

KARENA HIDUP GAK CUMA TENTANG HARI INI



Laporan Tahunan **2023**

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk



PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (selanjutnya disebut Perseroan atau Bank BTN) melakukan terobosan strategi pengembangan produk untuk menangkap peluang yang timbul dari demografi penduduk Indonesia yang didominasi oleh Gen Z dan milenial. Hal tersebut diwujudkan dengan mengembangkan fitur dan layanan Bank BTN dalam memiliki rumah, investasi dan menyiapkan dana pensiun yang terintegrasi secara *digital* melalui *Hero Campaign*-nya yaitu Hidup Gak Cuma Tentang Hari Ini (HGCTHI). Bank BTN mengajak

para milenial untuk mengembangkan bisnis jadi lebih besar dan memiliki kesadaran bahwa sekarang waktunya untuk punya rumah dengan tetap menjalani gaya hidup tanpa perlu khawatir terhadap KPR yang mereka miliki. Pengembangan bisnis perumahan di segmen *first home buyer* yang menjadi *captive market* Bank BTN diharapkan akan dapat mendorong pertumbuhan bisnis hingga 10 (sepuluh) tahun ke depan.



**KARENA HIDUP
GAK CUMA
TENTANG HARI INI**



Kesinambungan Tema —



2022

LAPORAN TAHUNAN



2021

LAPORAN TAHUNAN

Pengembangan Transformasi Bisnis dan Digitalisasi Berbasis Ekosistem Perumahan

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (selanjutnya disebut Perseroan atau Bank BTN) terus melaksanakan transformasi bisnis yang antara lain meliputi transformasi model operasional cabang, mengembangkan struktur *Strategic Business Unit* (SBU) dan menyusun transformasi *human capital* untuk mendukung rencana bisnis dan meningkatkan kapabilitas pegawai dalam rangka mencapai visi di tahun 2025 serta mengembangkan KPR di segmen milenial dengan pengembangan konsep *Transit Oriented Development* (TOD).

Seiring dengan transformasi bisnis, Perseroan juga memperkuat kapabilitas digitalisasi bisnis, khususnya untuk mengembangkan bisnis berbasis ekosistem perumahan melalui ekspansi *value chain* bisnis perumahan dengan membangun *one stop shop financial solution* layanan perbankan secara menyeluruh di segmen SME Komersial, Korporasi dan Nasabah Lembaga. Transformasi bisnis dan digitalisasi berbasis ekonomi perumahan yang telah dilakukan mampu meningkatkan kinerja Perseroan sesuai dengan harapan para *stakeholders*.

Transformasi Menuju *Best Mortgage Bank*

Mengusung semangat transformasi pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan, Perseroan menapaki tahun 2021 dengan percaya diri dalam menjalankan visi dan misinya. Dengan fundamental kokoh yang sudah dibangun sepanjang tahun 2020, langkah Perseroan ke depan akan semakin mantap bertransformasi Menjadi *The Best Mortgage Bank in Southeast Asia* pada tahun 2025.

Tahun ini Perseroan akan terus meningkatkan layanan perbankan yang dimiliki, disrupsi pandemi COVID-19 memberikan kesempatan bagi Perseroan untuk memacu performa layanan *digital* seperti *banking from home* dan aplikasi *mobile banking* serta membuat variasi produk KPR bersama produk *cash management* maupun produk tabungan untuk menarik nasabah agar lebih loyal terhadap Perseroan.

Sejak berdiri, Perseroan juga menjadi mitra pemerintah dalam mendukung perekonomian khususnya sebagai *agent of development* dengan merealisasikan kredit lebih dari Rp640 triliun dan disalurkan kepada lebih dari lima juta masyarakat di Indonesia dari seluruh segmen dan terus berupaya menjadi pemimpin dan inovator di dalam kompetisinya dengan perbankan nasional.

**2020****LAPORAN TAHUNAN****2019****LAPORAN TAHUNAN**

Tumbuh Berkelanjutan di Masa Pandemi

Tahun 2020 menjadi tahun yang penuh tantangan dan dilalui penuh perjuangan yang memaksa kita melakukan adaptasi terhadap “The New Normal”. Perseroan bertekad memperkuat inovasi/integritas membangun bisnis yang berkualitas dengan mencanangkan fokus dan inisiatif strategi yang menjadi acuan dalam memulihkan dan memacu bisnis Perseroan ke depan. Bagi Perseroan, pandemi COVID-19 menjadi motivasi untuk memacu kinerjanya dalam memperbaiki dan meningkatkan *business process* serta mengembangkan sejumlah strategi. Selain itu, Perseroan juga memperkuat kolaborasi sinergi dengan mitra bisnis. Hal ini memacu penyaluran kredit, meningkatkan dana pihak ketiga dan pendapatan non bunga sekaligus meningkatkan pelayanan perbankan kepada nasabah lewat berbagai inovasi *digital* yaitu BTN Mobile Banking, Portal BTN Properti, Portal Rumah Murah BTN, BTN Solusi dan Program Batara Spekta.

Di tengah masa pandemi COVID-19 dan perbaikan *business process*, Perseroan mampu membuahkan hasil yang cukup membanggakan. Laba Perseroan melampaui target yang ditetapkan dengan pertumbuhan mencapai 655,71% dibandingkan posisi tahun lalu. Sementara dana pihak ketiga juga melambung lebih dari 23,78% dibandingkan tahun lalu.

Pencapaian kinerja keuangan tersebut menjadi bukti nyata di tengah pandemi, para pegawai tetap dapat bekerja dan berkarya bagi Perseroan.

Tentang Laporan Tahunan

Laporan Tahunan ini merupakan laporan terintegrasi yang berisi ikhtisar data keuangan penting selama 5 (lima) tahun terakhir, profil perusahaan, laporan Direksi dan Dewan Komisaris, analisis dan pembahasan manajemen yang meliputi pencapaian kinerja Perusahaan, dibandingkan dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya, proyeksi kinerja serta prospek perusahaan. Dalam Laporan Tahunan ini juga dilaporkan tentang penerapan tata kelola perusahaan yang meliputi struktur dan proses tata kelola termasuk penerapan sistem manajemen risiko yang di antaranya menggambarkan profil risiko dan pengelolaannya. Dengan demikian Laporan Tahunan ini menempatkan kinerja historis ke dalam konteks dan menggambarkan risiko, peluang, dan prospek Perseroan di masa depan, sehingga diharapkan dapat membantu pemegang saham dan pemangku kepentingan memahami tujuan strategis Perseroan dan kemajuannya dalam menciptakan nilai yang berkelanjutan.

Rumah untuk Keluarga Milenial Indonesia

Besarnya jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 270 juta jiwa merupakan modal yang besar bagi perekonomian Indonesia. Tak hanya itu, dengan bonus demografi yang memprediksikan lebih kurang 20% diantaranya berusia 20-44 tahun, Indonesia menjadi negara dengan modal aset yang sangat potensial: penduduk dengan usia produktif yang besar.

Sebagai perbankan yang berfokus di sektor pembiayaan perumahan, Bank BTN mencoba menjadi bagian dari solusi untuk menjawab tantangan terkait penyediaan rumah bagi masyarakat Indonesia. Termasuk juga kebutuhan rumah bagi para “Milenial”, sebutan bagi generasi produktif Indonesia.

Fokus Bank BTN untuk menjadi bank tabungan di sektor pembiayaan perumahan akan menjadi agenda prioritas ke depan. Dengan potensi pasar para Milenial yang cukup besar, Bank BTN berharap mampu menjadi mitra dalam ekosistem industri perumahan dan properti, sekaligus terus-menerus memberikan nilai tambah bagi pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan.



Daftar Isi

Tema dan Arti Tema	1	Daftar Isi	4	Jejak Langkah	8
Kesinambungan Tema	2	Sekilas Tentang Perseroan	7	Kontribusi Terbaik Kami	10

Kilas Kinerja



Pencapaian Kinerja Penting 2023	16	Aksi Penghentian Sementara Perdagangan Saham (<i>Suspension</i>) dan/atau Penghapusan Pencatatan Saham (<i>Delisting</i>)	29	Informasi Sumber Pendanaan Lainnya	30
Ikhtisar Data Keuangan Penting	18	Informasi Obligasi, Sukuk dan/atau Obligasi Konversi	28	Rating Perusahaan 2023	32
Ikhtisar Keuangan dan Rasio Keuangan	18			Laporan Analisis Perusahaan	34
Ikhtisar Operasional	24			Peristiwa Penting 2023	35
Informasi Saham	25				
Aksi Korporasi	27				

Laporan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah



Laporan Direksi	44	Laporan Dewan Pengawas Syariah	72	Tanggung Jawab Pelaporan Tahunan 2023	76
Laporan Dewan Komisaris	62				

Profil Perusahaan



Identitas Perusahaan	80	Profil Direksi	120	Kepemilikan Saham Direksi dan Dewan Komisaris	173
Nama dan Alamat Kantor Wilayah, Kantor Cabang Konvensional dan Kantor Cabang Syariah	82	Profil Dewan Komisaris	134	Kepemilikan Saham oleh Senior Manajemen	174
Jaringan Mitra Usaha	88	Profil Dewan Pengawas Syariah	145	Klasifikasi Pemegang Saham	175
Brand Perusahaan	91	Profil Pejabat Eksekutif	150	Pemegang Saham Utama dan Pengendali	175
Riwayat Singkat Perusahaan	92	Profil Pegawai	168	Daftar Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Perusahaan Ventura Bersama	175
Keterangan Perubahan Nama	93	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	168	Informasi Kelompok Usaha Bank	175
Visi, Misi dan Budaya Perusahaan	94	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan	168	Struktur Grup Perusahaan	176
Visi	94	Jumlah Pegawai Berdasarkan Rentang Usia	169	Kronologi Penerbitan Saham	176
Misi	95	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	169	Kronologi Penerbitan dan/atau Pencatatan Obligasi Serta Efek Lainnya	178
Reviu Visi dan Misi Oleh Dewan Komisaris dan Direksi	95	Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Ketenagakerjaan	169	Informasi Penggunaan Jasa Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP)	188
Budaya Perusahaan	96	Jumlah Pekerja Berdasarkan Masa Kerja	169	Nama dan Alamat Lembaga dan/atau Profesi Penunjang	188
Kegiatan Usaha	100	Komposisi Pemegang Saham	170	Penghargaan dan Sertifikasi	193
Kegiatan Usaha Menurut Anggaran Dasar dan yang Dijalankan	100	Komposisi 20 Pemegang Saham Terbesar	171	Informasi yang Tersedia pada Website	203
Produk dan Jasa	101	Komposisi Pemegang Saham 5% atau Lebih	172		
Daftar Keanggotaan Asosiasi	115	Komposisi Kelompok Pemegang Saham Kurang dari 5%	172		
Wilayah Operasional	116				
Struktur Organisasi	118				

Analisis dan Pembahasan Manajemen atas Kinerja Perseroan



Tinjauan Perekonomian	206	Kolektibilitas Piutang	283	Evaluasi Rencana Jangka Panjang (RJP)	304
Analisis Perekonomian Global	206	Suku Bunga Dana	284	Kebijakan, Pengumuman dan Pembayaran Dividen	305
Analisis Perekonomian Indonesia	206	Suku Bunga Dasar Kredit	287	Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum	306
Analisis Industri Perbankan	207	Analisis Kualitas Aset Produktif	287	Informasi Material Mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Penggabungan/Peleburan Usaha, Akuisisi atau Restrukturisasi Hutang dan Modal	307
Analisis Industri Perumahan	208	Akselerasi Pertumbuhan <i>Fee Based Income</i>	290	Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi dengan Pihak Afiliasi	308
Analisis Posisi Perseroan Dalam Industri Perbankan	209	Pertumbuhan Volume Transaksi <i>Digital</i>	290	Perubahan Peraturan Perundang-Undangan dan Dampaknya Terhadap Perseroan	315
Tinjauan Operasional	212	Struktur Permodalan Bank	290	Perubahan Kebijakan Akuntansi	320
Rencana Strategis Bank	212	Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal dan Dasar Penentuan Kebijakan	290	Tingkat Kesehatan Bank	321
Aspek Pemasaran	219	Rincian Struktur Modal	291	Informasi Kelangsungan Usaha	321
Strategi Pemasaran	219	Ikatan Material Terkait Investasi Barang Modal	292	Pengungkapan Kerangka Governansi, Pengelolaan dan Pengendalian Aspek Perpajakan	323
Pangsa Pasar	231	Investasi Barang Modal	293	Respon Terhadap Perubahan Arah Kebijakan Moneter	324
Tinjauan Operasi Per Segmen Usaha	232	Komitmen dan Kontinjensi	293	Transaksi <i>Spot</i> dan Transaksi Derivatif	325
Segmen Konvensional	232	Perjanjian Signifikan	294	Laporan Penggunaan Tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN)	326
Segmen Syariah	251	Informasi dan Fakta Material Setelah Tanggal Laporan Akuntan	295		
Proyek Strategis Nasional (PSN) atau Penugasan Lain	264	Rincian Masalah Yang Timbul Selama Tahun Buku Yang Mempengaruhi Kegiatan Usaha BUMN	295		
Tinjauan Keuangan	266	Prospek Usaha dan Strategi Ke Depan	296		
Kinerja Keuangan	266	Pencapaian Target dan Target Ke Depan	298		
Laporan Posisi Keuangan	266	Pencapaian Target 2023	298		
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	274	Target Ke Depan	301		
Laporan Arus Kas	277				
Kemampuan Membayar Utang dan Kolektibilitas Piutang	280				
Kemampuan Membayar Utang	280				

Informasi Eksposur Risiko dan Permodalan



Risiko Kredit	330	Risiko Pasar	359	Risiko Operasional	361

Human Capital



Program Kerja Pengembangan Sumber Daya Manusia	372	Pengembangan Karir	378	Human Capital Information System (HCIS)	383
Kebijakan dan Pelaksanaan Manajemen <i>Human Capital</i>	373	Penilaian Kinerja	380	Internalisasi Budaya	384
Rekrutmen	373	Remunerasi	381	Struktur Pengelola <i>Human Capital</i>	388
Pengembangan Kompetensi	375	Program Pensiun	382	Rencana Kerja <i>Human Capital</i> Tahun 2024	390



Teknologi Informasi



Strategi Teknologi Informasi	394	Struktur Pengelola Teknologi Informasi	401	Pengembangan Kompetensi Teknologi Informasi Tahun 2023	402
Inovasi Teknologi Informasi	395	Hasil Evaluasi Atas Efektivitas Penyelenggaraan Teknologi Informasi Tahun 2023	402	Rencana Kerja Teknologi Informasi Tahun 2024	403
Infrastruktur Teknologi Informasi	396				
Tata Kelola Teknologi Informasi	397				

Tata Kelola Perusahaan



Pencapaian dalam Penerapan Tata Kelola Perusahaan	406	Organ dan Komite di Bawah Direksi	547	Jumlah Penyimpangan (Internal Fraud) dan Upaya Penyelesaian	669
Dasar Penerapan Tata Kelola Perusahaan	407	Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum	597	Pemberian Dana Kegiatan Sosial dan/atau Politik	669
Tujuan dan Prinsip Penerapan Tata Kelola	408	Akuntan Publik	604	Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar	669
Komitmen Penerapan Tata Kelola Perusahaan	409	Sistem Pengendalian Internal	605	Buyback Saham dan Buyback Obligasi	670
Implementasi Tata Kelola Perusahaan	410	Laporan Manajemen Risiko	610	Rencana Strategis Bank	670
Struktur dan Mekanisme Tata Kelola Perusahaan	416	Fungsi Kepatuhan	627	Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan	670
Struktur Organ Perusahaan	416	Program Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) dan Pencegahan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM)	636	Perselisihan Internal	670
Governance Soft Structure	417	Perkara Hukum	637	Pencegahan Transaksi Orang Dalam (Insider Trading)	670
Mekanisme Tata Kelola Perusahaan	417	Sanksi Administratif yang Dikenakan Kepada Perusahaan, Anggota Dewan Komisaris dan Direksi oleh Otoritas Pasar Modal dan Otoritas Lainnya	638	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	670
Pemegang Saham	417	Akses Informasi dan Data Perusahaan	638	Penerapan Keuangan Berkelanjutan Termasuk Penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan	670
Rapat Umum Pemegang Saham	419	Kode Etik	648	Laporan Tata Kelola Unit Usaha Syariah	671
Direksi	434	Kebijakan Pemberian Kompensasi Jangka Panjang Berbasis Kinerja Kepada Manajemen	652	Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka	684
Dewan Komisaris	465	Whistleblowing System	653	Governance Principles for Banks yang Diterbitkan oleh Basel Committee in Banking Supervision	693
Prosedur dan Pelaksanaan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris	497	Program Anti Korupsi	662	Good Corporate Governance Assessment	694
Kebijakan Keberagaman Dewan Komisaris dan Direksi	502	Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)	668		
Transparansi Kepemilikan Saham Direksi dan Dewan Komisaris	504				
Organ dan Komite di Bawah Dewan Komisaris	508				

Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan



Indeks Referensi OJK

Laporan Keuangan

Laporan PUMK

Laporan Tingkat Kesehatan

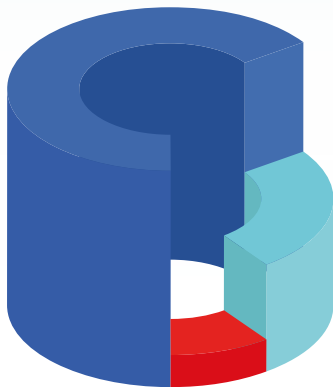
Sekilas Tentang Perseroan —

KEPEMILIKAN



TOTAL ASET

sebesar
Rp438,75
 triliun



BIDANG USAHA

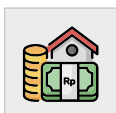
Bank Umum

JUMLAH KANTOR

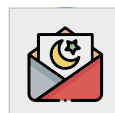
631 Jaringan Kantor Konvensional
109 Jaringan Kantor Syariah



PRODUK DAN JASA



**Perbankan
Konvensional**



**Perbankan
Syariah**



Jejak Langkah —

Perseroan berdiri dengan nama "*Postspaarbank*" pada masa Pemerintahan Hindia Belanda.

1897

1942

Perseroan diambil alih Pemerintah Jepang dan diganti namanya dengan *Tyokin Kyoku* atau Kantor Tabungan.

1945

Pemerintah RI mengambil alih *Tyokin Kyoku* dan didirikan Kantor Taboengan Pos.

1946

Semua Kantor Taboengan Pos diduduki oleh Belanda dan berhenti bekerja.

1949

Pemerintah RI membuka kembali Kantor Taboengan Pos dengan nama Bank Tabungan Pos RI.

1950

Perubahan nama menjadi "*Bank Tabungan Pos*" oleh Pemerintah RI.

1953

Dikukuhkan sebagai badan hukum di bawah Kementerian Perhubungan dan diizinkan membuka Kantor Cabang.

Efektif menjadi PT Persero.

1992

1989

Pertama kali menerbitkan Obligasi dan awal melaksanakan kegiatan bank umum.

1994

Memperoleh izin untuk beroperasi sebagai Bank Devisa.

2001

Direkapitalisasi oleh Pemerintah RI dengan nilai Rp13,6 triliun.

2002

Dengan sistem *online real* sistem berbasis IBM-AS400, teknologi informasi diimplementasikan ke seluruh Kantor Cabang.

2005

Pembentukan Usaha Unit Syariah dan dibuka Kantor Cabang Syariah pertama di Jakarta Harmoni.

Pengembangan berbagai produk dan layanan yang berbasis *digital*, salah satunya adalah pembukaan *Smart Branch* Jakarta Harmoni.

2017

Pengembangan ekosistem *digital* untuk mendukung bisnis sebagai bank pembiayaan perumahan terdepan di Indonesia.

2018

Menjadi *Housing Market Maker* dan memperkuat posisi sebagai Bank Terbesar ke-5.

2019

Memperbarui visi Menjadi *The Best Mortgage Bank* di *Southeast Asia* pada Tahun 2025.

2020

Pengintegrasian Bank-bank Umum Negara dan Bank Tabungan Negara ke dalam Bank Sentral. Berdiri Bank Tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia yang terdiri dari Bank Tabungan Negara, Bank Indonesia, Bank Koperasi Tani dan Nelayan, Bank Umum Negara, BNI 1946 dan Bank Dagang Negara.

Bank BTN bekerja sama dengan Perum Pos dan Giro untuk melaksanakan program Tabungan Nasional (Tabanas) dan Tabungan Asuransi Berjangka (Taska).

Realisasi KPR BTN pertama kali di Perumahan Tanah Mas Kota Semarang.

1963

Berganti nama menjadi Bank Tabungan Negara dan berpindah menjadi di bawah Menteri Urusan Bank Sentral.

1965

1968

Bank tunggal kembali dipecah dan dibuka kembali Bank Tabungan Negara disingkat BTN.

1971

1974

Mendapat tugas membiayai perumahan rakyat dari Menteri Keuangan.

1976

1986

Realisasi KPR BTN pertama kali di Perumahan Tanah Mas Kota Semarang.

Sekuritisasi KPR melalui Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK-EBA) pertama di Indonesia. Perseroan melakukan Penawaran Umum Saham Perdana (IPO) dan *listing* di Bursa Efek Indonesia (Go Public).

Perseroan melakukan transformasi menuju *leading housing bank* dan *world class banking*.

Perseroan turut serta menyaksikan Program Sejuta Rumah untuk Rakyat.

2008

Memperoleh Sertifikasi ISO 9001-2000 untuk layanan kredit jangka menengah atas dengan pola layanan 1-5-1.

2009

2012

Melakukan *Rights Issue*.

2013

2014

Perseroan bersama SMF menandatangani Sekuritisasi terbesar.

2015

2016

Perseroan melanjutkan agenda transformasi yaitu "*Digital Banking Periods*".

Transformasi untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan.

2021

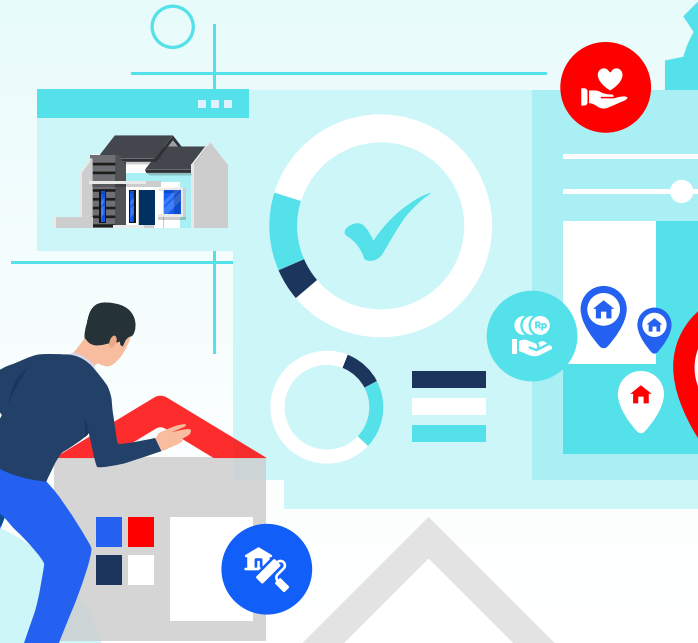
Perseroan melakukan aksi korporasi berupa Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II (PMHMETD II) dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atau *Rights Issue*.

2022





Kontribusi Terbaik Kami



Bank  BTN
Sahabat Keluarga Indonesia

TRANSFORMASI ORGANISASI

Sejalan dengan Visi dan Misi Bank BTN di Tahun 2025 yaitu menjadi “Menjadi *The Best Mortgage Bank in Southeast Asia* pada tahun 2025”, pada Tahun 2023 telah ditetapkan 14 Tema Inisiatif Strategis *Corporate Plan* sebagai implementasi Transformasi, yang terbagi dalam 4 (empat) Area Utama, yaitu *Funding*, *Lending*, *Digital* dan *Enabler*. Guna mendukung implementasi transformasi tersebut, pada tahun 2023 telah dilakukan *improvement business process* dan perbaikan di *area enabler*. Salah satunya adalah adanya penyesuaian dan perubahan struktur organisasi baik di Kantor Pusat, Kantor Wilayah dan Kantor Cabang.

Optimalisasi desain organisasi tersebut memiliki tujuan antara lain sebagai *streamline* aktivitas bisnis, membangun kapabilitas operasional dan Teknologi Informasi (TI), peningkatan kemampuan dan pemenuhan *human capital* untuk pertumbuhan, menyelaraskan peran Kantor Pusat, Kantor Wilayah dan Kantor Cabang serta mendukung integrasi dan konsolidasi sistem *Governance Risk Compliance* (GRC).



Sebagai perusahaan yang terus bertumbuh, maka keberlanjutan (*sustainability*) merupakan tujuan yang wajib dicapai dalam mengelola keberlangsungan bisnis. Dengan mempertimbangkan keseimbangan antara *profit*, *planet* dan *people*, maka Perseroan menganggap perlu mengembangkan *Environment, Social and Governance* (ESG) yang sejalan dengan regulasi serta selaras dengan strategi bisnis. Hal ini sejalan dengan *Roadmap* Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021-2025) dari OJK, di mana Perseroan diharapkan mengembangkan inisiatif-inisiatif pembiayaan yang inovatif dan *sustainable*.

Untuk mengimplementasikan tujuan tersebut, pada tahun 2023 telah dibentuk Komite ESG yang merupakan Komite di bawah Direksi dan Departemen ESG di Divisi Enterprise and ESG Risk Management. Dengan adanya pembentukan struktur organisasi terkait ESG ini diharapkan unit tersebut dapat mendorong strategi dan implementasi inisiatif ESG, meningkatkan akuntabilitas kinerja ESG, terlibat dan berkoordinasi dengan pemangku kepentingan, memastikan kepatuhan terhadap regulasi ESG, serta mendorong inovasi dengan mengidentifikasi peluang bisnis berkelanjutan.

Di area bisnis khususnya di bidang *lending*, terdapat perubahan struktur organisasi dengan dibentuknya Personal Banking Division. Pembentukan divisi baru ini dilatarbelakangi dengan melihat peluang bisnis *high yield loan* khususnya di segmen konsumen yang semakin berkembang. Dengan adanya Personal Banking Division untuk mengembangkan potensi bisnis lain di luar pembiayaan perumahan, diharapkan dapat memperkuat posisi Perseroan sebagai *market leader* di segmen *consumer lending*.

Di area *support* khususnya di bidang *collection*, terdapat pemisahan fungsi *consumer collection*, *recovery & asset sales* di Kantor Pusat menjadi 2 (dua) divisi. Divisi Consumer Collection, Recovery & Asset Sales 1 bertanggungjawab atas pengelolaan *front end* dan *early bucket*, sedangkan Divisi Consumer Collection, Recovery & Asset Sales 2 mengelola *middle to end bucket collection*. Pemisahan ini dilakukan agar pengelolaan *portfolio consumer collection* menjadi lebih fokus sehingga tingkat *Non Performing Loan* (NPL) dan *Loan at Risk* (LAR) Perseroan dapat terjaga.

Sejalan dengan transformasi di bidang *collection*, untuk efisiensi proses pengelolaan dan penjualan aset, maka dilakukan penggabungan 2 (dua) Divisi Commercial Asset Management menjadi 1 (satu). Penggabungan ini juga dilakukan dalam rangka penyehatan portofolio dan menjaga kualitas kredit komersial.

Tidak hanya mendukung *improvement* dalam perbaikan proses bisnis, perubahan struktur organisasi juga dilakukan untuk memperkuat fungsi *check and balance* dalam operasional di sentra-sentra bisnis Perseroan, yaitu di Kantor Wilayah, Kantor Cabang, sentra kredit konsumen (RLPC) dan sentra kredit komersial (CBC). Salah satu implementasi penguatan fungsi tersebut adalah dengan dibentuknya unit *Regional Business Control* (RBC), *Branch Business Control* (BBC) dan *Commercial Banking Center-Business Control* (CBC-BC), unit ini merupakan peralihan dari unit dan fungsi sejenis yang sebelumnya ada di Divisi Internal Audit.

Khusus unit *Regional Loan Processing Center-Business Control* (RLPC-BC) merupakan peralihan dari unit *Quality Assurance and Process Compliance* (QAPC) yang sebelumnya ada di Divisi Credit Operation. Unit ini bertugas memastikan kevalidan data *quality checking* di sistem aplikasi kredit konsumen serta mengawasi kinerja KPR *Processing* secara *end to end*.

Sejalan dengan pembentukan unit RBC, BBC, RLPC-BC dan CBC-BC tersebut maka dibentuk pula Departemen Operation Risk Controller di Divisi Enterprise and ESG Risk Management yang berfungsi sebagai *control tower*, *partner* yang bertugas menelaah kebijakan, standar dan strategi serta aktivitas yang dilakukan oleh RBC, BBC, RLPC-BC dan CBC-BC.

Unit Operational Risk Control juga berperan dalam memberikan masukan terkait aspek risiko terhadap tindak kecurangan (*fraud*) yang berasal dari hasil pemeriksaan untuk meningkatkan pengendalian internal di Kantor Cabang serta melakukan analisis risiko terhadap laporan pengendalian internal yang disampaikan oleh RBC, BBC, RLPC-BC dan CBC-BC.

Dengan adanya personel RBC, BBC, RLPC-BC dan CBC-BC yang ditempatkan di sentra bisnis Perseroan ditambah adanya Unit Operational Risk Control sebagai *partner* dan *control tower*, maka diharapkan fungsi 1,5 *line of defense* serta mitigasi risiko operasional di Bank BTN dapat dijalankan secara lebih baik dan intensif.

Sebagai kesatuan yang holistik, transformasi organisasi juga dilakukan di bidang *human resources* dengan dibentuknya Divisi Human Capital Business Partner. Tujuan dari pembentukan divisi ini adalah agar pengelolaan Sumber Daya Manusia dilakukan secara lebih fokus dalam pengembangan *talent-talent* terbaik Bank BTN dan mendukung aspirasi unit bisnis khususnya dalam pengelolaan personelnnya, hal ini sejalan dengan tujuan dari implementasi *Employee Value Proposition* (EVP) Bank BTN yaitu *Learn, Grow, Contribute and Engagement*.



PERSEROAN DUKUNG PERUMAHAN RAMAH LINGKUNGAN

Sebagai Bank yang fokus pada Perumahan, Bank BTN memiliki posisi strategis pada ekosistem perumahan nasional terutama pada segmen Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Penyaluran KPR BTN sangat membantu masyarakat Indonesia dalam memiliki hunian layak dan terjangkau. Selain itu, KPR BTN juga mampu mendukung terwujudnya ekosistem perumahan Indonesia yang baik dan stabil sehingga mampu menjaga stabilitas perekonomian nasional serta mendukung program perumahan.

Bank BTN merupakan mitra kerja pemerintah yang handal dalam program perumahan. Hal itu tidak hanya dalam program rumah bersubsidi tapi juga berperan dalam penyaluran dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sehingga mampu menjangkau lebih banyak masyarakat khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).



KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK



Perseroan sebagai Badan Publik melaksanakan keterbukaan informasi publik sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang *Monitoring* dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik.

Perseroan sebagai Badan Publik memiliki visi “Menjadi Bank Terbaik Dalam Memberikan Pelayanan Informasi Publik” dengan misi “Menyediakan Informasi Publik dan Layanan Melalui Inovasi Digital”. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 182/DIR/2016 tanggal 10 Mei 2016 Tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Kepala Divisi Corporate Secretary Division ditunjuk sebagai Pejabat Pengelola Informasi & Dokumentasi (PPID). Adapun struktur PPID Bank BTN yaitu terdiri atas Atasan PPID (Direksi), PPID (Corporate Secretary), dan PPID Pelaksana Pusat (Communication Department Head dan Reporting & Community Development Department Head). PPID memiliki tugas, fungsi, dan wewenang sebagai berikut:

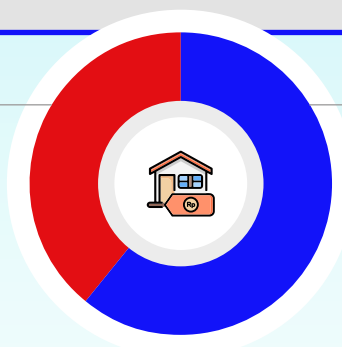
1. Tugas dan Fungsi

- a. Mengoordinasikan pengumpulan dan pendokumentasian seluruh Informasi Publik dari unit kerja di Perusahaan yang meliputi, informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; informasi yang wajib tersedia setiap saat; serta informasi terbuka lainnya yang diminta Pemohon Informasi Publik.
- b. Mengoordinasikan pendataan Informasi Publik yang dikuasai oleh unit kerja di Perusahaan dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik.

Total KPR

61%

Bank Lain



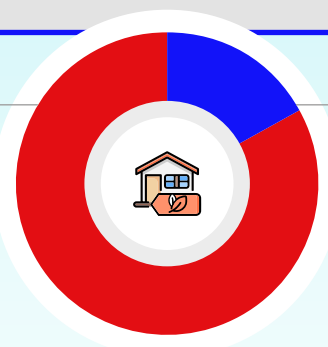
39%

Bank BTN

Total KPR Subsidi

83%

Bank BTN



17%

Bank Lain

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Perseroan, September 2023

- c. Menyediakan dan mengumumkan Informasi Publik melalui media yang secara efektif dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan.
- d. Mengoordinasikan penyediaan dan pelayanan Informasi Publik di unit pelayanan informasi untuk memenuhi permohonan Informasi Publik.
- e. Melakukan pengujian tentang konsekuensi yang timbul sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan.
- f. Menyertakan alasan tertulis pengecualian Informasi Publik secara jelas dan tegas, dalam hal permohonan Informasi Publik ditolak, serta menghitamkan atau mengaburkan Informasi Publik yang dikecualikan beserta alasannya.
- g. Mengembangkan kapasitas pejabat fungsional dan/atau petugas informasi dalam rangka peningkatan kualitas layanan Informasi Publik.
- h. Mengoordinasikan dan memastikan agar pengajuan keberatan diproses berdasarkan prosedur penyelesaian keberatan apabila permohonan Informasi Publik ditolak.
- i. Menyusun dan melaksanakan Standar Operasional Prosedur serta kebijakan pelayanan Informasi Publik.
- j. Menyusun dan mengumumkan laporan pelayanan Informasi Publik serta menyampaikan kepada Komisi Informasi.

2. Wewenang

- a. Mengoordinasikan setiap unit kerja dan unit pelayanan informasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik.
- b. Memutuskan suatu Informasi Publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi.
- c. Menolak permohonan Informasi Publik apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan.

Berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada tahun 2023, pada momen Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2023, Perseroan berhasil mendapat kualifikasi sebagai Badan Publik **"Informatif"** pada Kategori Badan Usaha Milik Negara. Hal tersebut merupakan pencapaian yang sangat baik mengingat terdapat peningkatan kualifikasi dari tahun buku sebelumnya yaitu dengan kualifikasi Menuju Informatif (2022) dan Kurang Informatif (2021).





KILAS KINERJA



“

Pada tahun 2023, Bank BTN menunjukkan pertumbuhan kinerja yang signifikan baik dari sisi operasional maupun keuangan. Kinerja Bank BTN juga mendapatkan pengakuan dari pihak eksternal dengan diterimanya penghargaan dalam skala nasional dan internasional.

Pencapaian Kinerja Penting 2023 —



Jumlah Aset

tahun 2023 sebesar

Rp438,75
triliun



Jumlah Ekuitas

tahun 2023 sebesar

Rp30,48
triliun



Laba Tahun Berjalan

tahun 2023 sebesar

Rp3,50
triliun



meningkat

9,10%

dari tahun 2022



meningkat

17,64%

dari tahun 2022



meningkat

14,97%

dari tahun 2022



Pembiayaan Syariah

tahun 2023 sebesar

Rp37,11

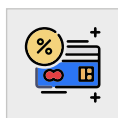
triliun



meningkat

17,36%

dari tahun 2022



Kredit Konsumer

tahun 2023 sebesar

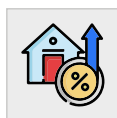
Rp42,45
triliun



meningkat

1,57%

dari tahun 2022



Kredit Komersial

tahun 2023 sebesar

Rp42,96
triliun



meningkat

14,10%

dari tahun 2022



Simpanan Komersial

tahun 2023 sebesar

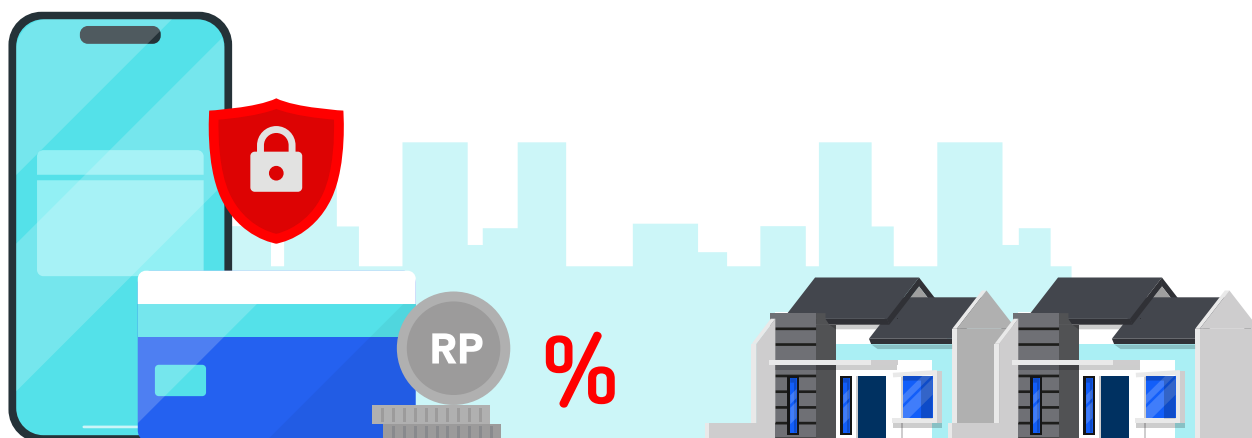
Rp243,69
triliun



meningkat

8,84%

dari tahun 2022



Dana Simpanan Syariah

tahun 2023 sebesar

Rp41,80
triliun



meningkat

20,68%

dari tahun 2022

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Ikhtisar Keuangan dan Rasio Keuangan

Tabel Ikhtisar Keuangan

(dalam Jutaan Rupiah)

Uraian	2023	2022	2021	2020	2019
LAPORAN POSISI KEUANGAN					
ASET					
KAS	2.127.489	1.661.533	1.539.577	1.429.426	1.369.167
GIRO PADA BANK INDONESIA	18.145.761	25.416.941	10.692.484	11.107.672	15.512.329
GIRO PADA BANK LAIN					
Pihak ketiga	1.153.949	963.935	1.000.338	2.995.233	391.877
Pihak berelasi	1.049.449	508.322	96.460	221.896	357.624
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.804)	(1.747)	(1.698)	(1.808)	(1.632)
	2.201.594	1.470.510	1.095.100	3.215.321	747.869
PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN					
Pihak ketiga	30.561.061	12.975.894	27.900.711	19.830.096	10.996.115
Pihak berelasi	61	61	337	337	101.078
EFEK-EFEK					
Pihak ketiga	1.454.768	873.109	891.173	1.123.406	5.985.588
Pihak berelasi	3.851.105	850.059	1.341.732	2.082.560	2.126.461
Cadangan kerugian penurunan nilai	(22.903)	(2.399)	(2.000)	(2.000)	(27.378)
	5.282.970	1.720.769	2.230.905	3.203.966	8.084.671
OBLIGASI PEMERINTAH					
Pihak berelasi	35.893.929	51.964.973	46.080.298	56.287.751	11.053.601
EFEK-EFEK YANG DIBELI DENGAN JANJII DIJUAL KEMBALI					
Pihak ketiga	-	1.434.190	1.598.325	954.955	1.675.221
Pihak berelasi	-	-	-	-	200.000
KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN/ PIUTANG SYARIAH					
Kredit yang diberikan					
Pihak ketiga	268.898.377	247.217.823	229.174.514	217.711.277	214.807.263
Pihak berelasi	27.685.483	19.439.742	18.110.919	17.340.839	17.405.276
Cadangan kerugian penurunan nilai	(14.191.536)	(14.104.914)	(13.165.897)	(12.151.936)	(5.425.908)
	282.392.324	252.552.651	234.119.536	222.900.180	226.786.631
Pembiayaan/piutang syariah					
Pihak ketiga	37.027.078	31.367.082	27.102.484	25.059.007	23.609.204
Pihak berelasi	87.203	257.057	447.374	3.040	3.416
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.400.428)	(1.570.009)	(1.269.863)	(909.007)	(690.258)
	35.713.853	30.054.130	26.279.995	24.153.040	22.922.362
TAGIHAN DERIVATIF					
Pihak ketiga	32.176	103.939	31.017	70.386	-
TAGIHAN AKSEPTASI					
Pihak ketiga	475.821	289.206	-	-	-
Pihak berelasi	68.746	131.356	454.140	196.071	487.052

Uraian	2023	2022	2021	2020	2019
Cadangan kerugian penurunan nilai	(23.876)	(136)	(623)	(1.393)	-
	520.691	420.426	453.517	194.678	487.052
PENYERTAAN SAHAM					
Pihak ketiga	-	-	-	-	270
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	-	-	-	(270)
ASET TETAP					
Biaya perolehan/Nilai revaluasi	12.953.746	10.599.848	9.468.655	9.053.182	8.108.086
Akumulasi penyusutan	(4.835.934)	(4.246.045)	(3.731.864)	(3.234.737)	(2.707.428)
BUNGA YANG MASIH AKAN DITERIMA	11.526.687	10.750.302	9.173.536	6.285.574	3.210.772
ASET PAJAK TANGGUHAN - Neto	2.998.282	2.915.428	2.430.660	1.972.393	629.105
ASET LAIN-LAIN	3.235.046	2.352.762	2.505.522	3.784.186	2.600.197
TOTAL ASET	438.749.736	402.148.312	371.868.311	361.208.406	311.776.828
LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS					
LIABILITAS					
LIABILITAS SEGERA	3.277.514	3.205.358	3.654.236	4.765.276	1.999.183
SIMPANAN DARI NASABAH					
Giro					
Pihak ketiga	20.957.283	17.636.481	12.806.732	16.546.465	9.583.560
Pihak berelasi	108.412.008	87.264.437	60.556.142	52.054.300	38.524.556
Giro Wadiah					
Pihak ketiga	2.402.428	1.783.134	1.176.350	946.930	917.455
Pihak berelasi	11.037.037	6.841.675	4.179.603	2.138.165	1.675.555
	142.808.756	113.525.727	78.718.827	71.685.860	50.701.126
Tabungan					
Pihak ketiga	37.029.999	35.656.990	46.363.367	38.279.792	41.212.905
Pihak berelasi	692.162	525.339	436.034	420.345	272.004
Tabungan Wadiah					
Pihak ketiga	1.274.456	1.192.775	1.149.143	903.998	789.042
Pihak berelasi	2.136	943	1.096	1.211	847
	38.998.753	37.376.047	47.949.640	39.605.346	42.274.798
Deposito berjangka					
Pihak ketiga	63.976.056	66.808.185	53.067.211	60.918.288	61.281.176
Pihak berelasi	76.717.583	79.389.842	93.453.378	86.940.320	52.648.592
	140.693.639	146.198.027	146.520.589	147.858.608	113.929.768
Total simpanan dari nasabah	322.501.148	297.099.801	273.189.056	259.149.814	206.905.692
SIMPANAN DARI BANK LAIN					
Pihak ketiga	91.312	136.408	66.007	29.880	4.509.238
EFEK-EFEK YANG DIJUAL DENGAN JANJI DIBELI KEMBALI					
Pihak ketiga	-	-	-	-	935.000
LIABILITAS AKSEPTASI					
Pihak ketiga	320.522	302.037	292.220	196.071	-
Pihak berelasi	224.045	118.525	161.920	-	487.052
LIABILITAS DERIVATIF					
Pihak ketiga	-	-	17.741	22.787	-
SURAT-SURAT BERTAGANG YANG DITERBITKAN					
Pihak ketiga	2.403.573	4.297.252	8.094.441	10.835.733	14.405.980
Pihak berelasi	5.868.525	4.355.008	4.277.267	4.974.733	5.377.572
PINJAMAN YANG DITERIMA					
Pihak ketiga	11.308.799	7.365.320	6.499.997	6.798.082	8.681.368

Uraian	2023	2022	2021	2020	2019
Pihak berelasi	22.453.290	17.455.685	15.562.294	17.009.056	13.784.289
BUNGA YANG MASIH HARUS DIBAYAR	647.496	629.366	496.725	726.914	630.002
ESTIMASI KERUGIAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI	3.580	4.719	3.644	6.489	-
LIABILITAS IMBALAN KERJA DAN LAIN-LAIN	2.951.848	7.248.985	6.618.300	6.666.875	5.736.637
PINJAMAN SUBORDINASI DAN EFEK-EFEK SUBORDINASI					
Pihak ketiga	4.612.840	4.658.242	4.259.776	4.194.554	-
Pihak berelasi	4.499.997	4.499.977	4.499.968	5.999.878	5.999.669
TOTAL LIABILITAS	381.164.489	351.376.683	327.693.592	321.376.142	269.451.682
DANA SYIRKAH TEMPORER					
SIMPANAN NASABAH					
Giro Mudharabah					
Pihak ketiga	712.587	468.889	467.333	341.653	826.682
Pihak berelasi	13.474	11.897	12.281	17.033	588.030
Tabungan Mudharabah					
Pihak ketiga	5.331.249	4.730.686	3.466.529	2.683.283	3.226.349
Pihak berelasi	141.993	88.427	505.563	430.860	136.577
Deposito berjangka Mudharabah					
Pihak ketiga	11.975.188	11.886.366	8.887.336	11.022.780	11.661.400
Pihak berelasi	8.908.369	7.637.191	9.424.102	5.345.495	2.038.501
Total simpanan nasabah	27.082.860	24.823.456	22.763.144	19.841.104	18.477.539
SIMPANAN DARI BANK LAIN					
Giro Mudharabah					
Pihak ketiga	4.154	56	46	176	243
Tabungan Mudharabah					
Pihak ketiga	14.781	19.674	1.882	2.139	3.299
Deposito berjangka Mudharabah					
Pihak ketiga	4.300	19.089	3.000	1.000	7.870
Total simpanan dari bank lain	23.235	38.819	4.928	3.315	11.412
TOTAL DANA SYIRKAH TEMPORER	27.106.095	24.862.275	22.768.072	19.844.419	18.488.951
EKUITAS					
Modal saham – nominal Rp500 (Rupiah penuh) per saham masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022					
Modal dasar 20.478.432.000 saham (nilai penuh) (terdiri dari 1 lembar saham seri A Dwiwarna dan 20.478.431.999 lembar saham seri B) masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022					
Modal ditempatkan dan disetor penuh 14.034.444.413 saham (nilai penuh) (terdiri dari 1 lembar saham seri A Dwiwarna dan 14.034.444.412 lembar Saham seri B) pada 31 Desember 2023 dan 10.590.000.000 sahan (nilai penuh) (terdiri dari 1 lembar saham seri A Dwiwarna dan 10.589.999.999 lembar Saham seri B) pada tanggal 31 Desember 2022	7.017.222	5.295.000	5.295.000	5.295.000	5.295.000
Tambahan modal disetor	4.418.900	2.054.454	2.054.454	2.054.454	2.054.454
Dana setoran modal	-	2.756.575	-	-	-
Keuntungan neto yang belum direalisasi dan cadangan kerugian penurunan nilai atas efek-efek dan obligasi Pemerintah diukur pada nilai wajar melalui pengahasilan komprehensif lain-setelah pajak tangguhan	(769.001)	(1.193.252)	87.817	1.100.019	11.460
Pengukuran kembali					

Uraian	2023	2022	2021	2020	2019
Program Imbalan Pasti - setelah pajak tangguhan	(560.339)	(409.657)	(458.153)	(531.674)	(194.707)
Bagian efektif Lindung Nilai - Arus Kas	(32.346)	(49.301)	(19.983)	(1.239)	-
Surplus Revaluasi Aset Tetap	3.565.773	3.508.565	3.307.991	3.307.991	3.307.991
Saldo laba*					
Telah ditentukan penggunaannya	13.181.214	10.745.157	8.606.555	7.004.198	12.995.995
Belum ditentukan penggunaannya	3.657.729	3.201.813	2.532.966	1.759.096	366.002
TOTAL EKUITAS	30.479.152	25.909.354	21.406.647	19.987.845	23.836.195
JUMLAH LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS	438.749.736	402.148.312	371.868.311	361.208.406	311.776.828
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN					
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL					
Pendapatan Bunga dan Bagi Hasil					
Bagi Hasil Bunga	24.722.529	23.233.200	23.413.857	22.947.252	23.271.432
Bagi hasil dan marjin unit syariah	3.558.723	2.674.168	2.381.101	2.169.236	2.448.442
Total Pendapatan Bunga dan Bagi Hasil	28.281.252	25.907.368	25.794.958	25.116.488	25.719.874
Beban Bunga, Bagi Hasil dan Bonus					
Bunga	(13.203.108)	(9.866.919)	(11.670.728)	(14.687.492)	(15.167.294)
Beban pendanaan lainnya	(203.317)	(169.804)	(177.585)	(147.146)	(157.708)
Bonus Simpanan Wadiah	(71.621)	(57.558)	(32.175)	(21.782)	(15.641)
Hak Pihak Ketiga atas Bagi hasil Mudharabah	(1.372.916)	(815.803)	(923.167)	(1.335.517)	(1.417.430)
Total Beban Bunga, Bagi Hasil dan Bonus	(14.850.962)	(10.910.084)	(12.803.655)	(16.191.937)	(16.758.073)
Pendapatan Bunga dan Bagi Hasil - Neto	13.430.290	14.997.284	12.991.303	8.924.551	8.961.801
Pendapatan Operasional Lainnya					
Pungutan administrasi dan denda atas simpanan dan kredit yang diberikan	1.096.346	965.441	852.953	760.751	832.556
Pendapatan dari penerimaan kredit yang dihapusbukukan	934.191	431.591	304.810	275.538	113.399
Keuntungan (kerugian) dari penjualan efek-efek - neto	6.669	(234.089)	76.734	356.168	478.339
Keuntungan (kerugian) dari penjualan obligasi pemerintah - neto	541.392	(266.235)	818.679	308.351	144.553
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar efek-efek - neto	1.802	(64.931)	(135.338)	18.493	20.894
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar obligasi pemerintah - neto	(5.780)	55.045	(18.778)	87.011	1.745
Lain-lain	1.310.747	822.775	463.507	708.295	518.366
Total Pendapatan Operasional Lainnya	3.885.367	1.709.597	2.362.567	2.514.607	2.109.852
Penyisihan kerugian penurunan nilai aset keuangan dan non-aset keuangan	(3.765.397)	(4.017.378)	(3.627.477)	(2.258.479)	(3.486.665)
Pembalikan (Penyisihan) Estimasi Kerugian Penurunan Nilai Komitmen dan Kontinjensi	1.139	(1.075)	2.845	(3.784)	-
Beban Operasional Lainnya					
Umum dan administrasi	(3.884.779)	(3.754.028)	(3.358.846)	(3.114.260)	(3.425.022)
Gaji dan tunjangan karyawan	(3.982.503)	(4.190.298)	(3.782.925)	(2.977.208)	(2.863.955)
Premi program penjaminan Pemerintah	(656.774)	(599.991)	(619.667)	(469.360)	(467.791)
Lain-lain	(487.614)	(329.308)	(930.968)	(285.782)	(306.447)
Total Beban Operasional Lainnya	(9.011.670)	(8.873.625)	(8.692.406)	(6.846.610)	(7.063.215)
LABA OPERASIONAL	4.539.729	3.814.803	3.036.832	2.330.285	521.773
BEBAN BUKAN OPERASIONAL - NETO	(159.519)	60.887	(43.512)	(59.428)	(110.711)
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK	4.380.210	3.875.690	2.993.320	2.270.857	411.062
BEBAN PAJAK	(879.222)	(830.617)	(617.093)	(668.499)	(201.799)
LABA TAHUN BERJALAN	3.500.988	3.045.073	2.376.227	1.602.358	209.263
Pendapatan Komprehensif Lain:					

Uraian	2023	2022	2021	2020	2019
Akun-akun yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi					
Surplus Revaluasi Aset Tetap	57.208	200.574	-	-	341.000
Pengukuran kembali program imbalan pasti	(186.027)	59.872	75.005	(397.512)	(132.869)
Pajak penghasilan terkait akun-akun yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	35.345	(11.376)	(1.484)	60.545	21.048
Akun-akun yang akan direklasifikasi ke laba rugi					
Bagian Efektif Lindung Nilai – Arus Kas	20.932	(40.883)	(18.744)	(1.239)	-
Keuntungan (kerugian) neto yang belum direalisasi atas perubahan nilai efek-efek dan obligasi pemerintah yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	517.528	(1.576.967)	(1.259.616)	1.342.481	148.613
Pajak penghasilan terkait akun-akun yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(97.254)	307.463	247.414	(253.922)	(9.723)
Total laba komprehensif tahun berjalan	3.848.720	1.983.756	1.418.802	2.352.711	557.332
Laba Per Saham Dasar (nilai penuh)	249	288	224	151	20
LAPORAN ARUS KAS					
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI					
Penerimaan bunga, bagi hasil dan marjin	27.618.186	24.331.326	22.427.061	22.025.695	25.453.902
Penerimaan kredit yang telah dihapusbukukan	1.011.258	503.307	362.436	331.915	153.997
Pembayaran bunga dan bonus, provisi dan komisi	(14.892.249)	(10.775.222)	(13.027.787)	(16.095.612)	(16.646.046)
Pembayaran pajak penghasilan badan	(1.020.952)	(1.001.324)	(820.461)	(341.466)	(590.027)
Penerimaan dari surat ketetapan pajak	-	402.428	-	-	6.710
Beban operasional lainnya - neto	(5.790.828)	(6.896.183)	(5.927.136)	(3.986.344)	(4.845.107)
Pendapatan (beban) bukan operasional lainnya - neto	(54.382)	13.828	(27.932)	(59.428)	(110.711)
Penerimaan kas sebelum perubahan aset dan liabilitas operasi	6.871.033	6.578.160	2.986.181	1.874.760	3.422.718
Perubahan dalam aset dan liabilitas operasi:					
Kenaikan (penurunan) dalam aset operasi:					
Penempatan pada bank lain	-	-	947.105	(595.305)	(351.800)
Efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi	(246.380)	(104.885)	849.641	172.622	2.452.777
Obligasi pemerintah yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	15.788.979	(4.955.939)	4.842.769	(18.122.548)	1.547.115
Tagihan akseptasi	(124.005)	33.578	(258.069)	-	-
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah	(38.484.306)	(26.318.471)	(16.988.247)	(7.255.860)	(18.229.537)
Aset lain-lain	(785.307)	(196.503)	1.241.584	(1.285.447)	300.335
Kenaikan (penurunan) dalam Liabilitas operasi:					
Liabilitas segera	74.415	(466.852)	(1.120.009)	2.446.942	(301.002)
Simpanan dari nasabah					
Giro	24.468.372	31.538.044	4.762.109	20.492.649	(5.565.072)
Giro Wadiah	4.814.656	3.268.857	2.270.858	492.085	(188.844)
Tabungan	1.539.832	(10.617.072)	8.099.264	(2.784.772)	3.134.070
Tabungan Wadiah	82.875	43.479	245.030	115.320	23.565
Deposito berjangka	(5.504.388)	(322.562)	(1.338.019)	33.928.841	(1.532.515)
Simpanan dari bank lain	(45.095)	70.400	36.127	(4.479.357)	1.516.659
Liabilitas akseptasi	124.005	(33.578)	258.069	-	-
Liabilitas lain-lain	(4.184.154)	654.214	(206.114)	303.204	(734.052)
Dana syirkah temporer	2.243.821	2.094.203	2.923.653	1.355.469	(322.778)
Kas Neto digunakan untuk Aktivitas Operasi	6.634.353	1.265.073	9.551.932	26.658.603	(14.828.361)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI					

Uraian	2023	2022	2021	2020	2019
Penerimaan saat jatuh tempo dari efek-efek biaya perolehan diamortisasi	(2.868.515)	199.964	-	1.061.584	-
Penerimaan saat jatuh tempo dari efek-efek yang dimiliki hingga jatuh tempo	-	-	-	-	-
Perolehan Aset tetap	(2.313.490)	(1.042.464)	(415.473)	(798.086)	(366.561)
Penurunan efek-efek diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	(1.247.159)	381.580	330.249	1.082.203	-
Kenaikan (penurunan) obligasi pemerintah diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	2.211.325	5.714.402	10.722.233	(25.844.225)	(2.085.930)
Pembelian obligasi pemerintah pada biaya perolehan diamortisasi	(1.655.566)	(7.816.426)	(5.922.417)	(148.619)	-
Pembelian efek-efek yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi	-	-	(236.767)	-	-
Penerimaan efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	45.031.457	163.410	-	920.267	-
Penempatan efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	(43.597.267)	-	(643.370)	-	(1.875.221)
(Kenaikan) Penurunan efek-efek tersedia untuk dijual	-	-	-	-	(718.350)
Pembelian obligasi pemerintah yang dimiliki hingga jatuh tempo	-	-	-	-	(947.963)
Pembelian efek-efek yang dimiliki hingga jatuh tempo	-	-	-	-	(1.083.081)
Kas Neto diperoleh dari (digunakan untuk) Aktivitas Investasi	(4.439.215)	(2.399.534)	3.834.455	(23.726.876)	(7.077.106)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN					
Penerimaan dari surat-surat berharga yang diterbitkan	2.449.019	1.541.330	10.186	1.493.811	4.144.000
Pembayaran atas surat-surat berharga yang diterbitkan jatuh tempo	(2.769.764)	(5.263.000)	(3.455.000)	(5.322.500)	(5.122.930)
Penerimaan atas efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	67.691.353	592.326	1.716.191	-	-
Pembayaran atas efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali jatuh tempo	(67.691.353)	(592.326)	(1.716.191)	(935.000)	-
Eksekusi opsi saham karyawan	-	-	-	-	-
Pembayaran dividen	(609.015)	(237.624)	-	(20.927)	(561.585)
Penerimaan dari pinjaman yang diterima	11.185.162	11.814.826	6.455.429	9.141.448	11.001.654
Pembayaran dari pinjaman yang diterima	(2.187.576)	(9.095.884)	(8.204.691)	(7.823.008)	(4.020.720)
Penerimaan dari efek-efek subordinasi	-	-	1.500.000	4.047.884	2.999.950
Pembayaran Liabilitas Sewa	(81.973)	(84.983)	(99.959)	(125.788)	-
Pembayaran atas pinjaman dan efek-efek subordinasi jatuh tempo	-	-	(3.000.000)	-	-
Dana setoran modal	1.330.093	2.756.575	-	-	-
Kas Neto diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	9.315.946	1.431.240	(6.794.035)	455.920	8.440.369
Kenaikan (Penurunan) Neto Kas dan Setara Kas	11.511.084	296.779	6.592.352	3.387.647	(13.465.098)
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	41.526.686	41.229.907	34.637.555	31.249.908	44.715.006
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	53.037.770	41.526.686	41.229.907	34.637.555	31.249.908
Rincian kas dan setara kas akhir tahun adalah sebagai berikut:					
Kas	2.127.489	1.661.533	1.539.577	1.429.426	1.369.167
Giro pada Bank Indonesia	18.145.761	25.416.941	10.692.484	11.107.672	15.512.329
Giro pada bank lain	2.203.398	1.472.257	1.096.798	3.217.129	749.501
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain - jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehan	30.561.122	12.975.955	27.901.048	18.883.328	10.745.393
Sertifikat Bank Indonesia - jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehan	-	-	-	-	2.873.518
Total	53.037.770	41.526.686	41.229.907	34.637.555	31.249.908

Uraian	2023	2022	2021	2020	2019
RASIO KEUANGAN (%)					
Likuiditas					
Loan to Deposit Ratio (LDR)	95,36	92,65	92,86	93,19	113,50
Profitabilitas					
Rasio Liabilitas Terhadap Jumlah Aset	86,88	87,37	88,12	88,97	86,42
Rasio Liabilitas Terhadap Jumlah Ekuitas	1.250,57	1.356,18	1.530,80	1.607,86	1.130,43
Rasio Laba Rugi terhadap Pendapatan	10,88	11,03	8,44	5,80	0,75
Return on Asset (ROA)	1,07	1,02	0,81	0,69	0,13
Return on Equity (ROE)	13,86	16,42	13,64	10,02	1,00
Net Interest Margin (NIM)	3,75	4,40	3,99	3,06	3,32
Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	86,10	86,00	89,28	91,61	98,12
Kualitas Kredit					
Non Performing Loan (NPL) Gross	3,01	3,38	3,70	4,37	4,78
Non Performing Loan (NPL) Net	1,32	1,32	1,20	2,06	2,96
Aset Produktif					
Aset Produktif Bermasalah terhadap Total Aset Produktif	1,85	2,58	-	-	-
Penyisihan Penurunan Nilai Aset Produktif terhadap Total Aset Produktif	2,92	3,88	-	-	-
Permodalan					
Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) (KPM)	20,16	20,17	19,14	19,34	17,32
Kepatuhan					
Persentase Pelanggaran BMPK					
Pihak Terkait	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pihak Tidak Terkait	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Persentase Pelampauan BMPK					
Pihak Terkait	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pihak Tidak Terkait	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Giro Wajib Minimum (GWM)					
GWM Utama Rupiah					
Konvensional	6,04	8,28	3,55	3,16	6,19
Syariah	6,10	7,76	3,70	3,15	4,64
GWM Valuta Asing	4,40	4,13	6,24	4,63	8,28
Posisi Devisa Netto (PDN)	1,73	4,17	2,63	3,17	4,14
Rasio Lainnya					
Cost to Income Ratio (CIR)	45,26	46,66	48,18	53,85	58,08

*Saldo defisit sebesar Rp14.226.290 telah dieliminasi akibat kuasi reorganisasi pada tanggal 31 Mei 2007.

Ikhtisar Operasional

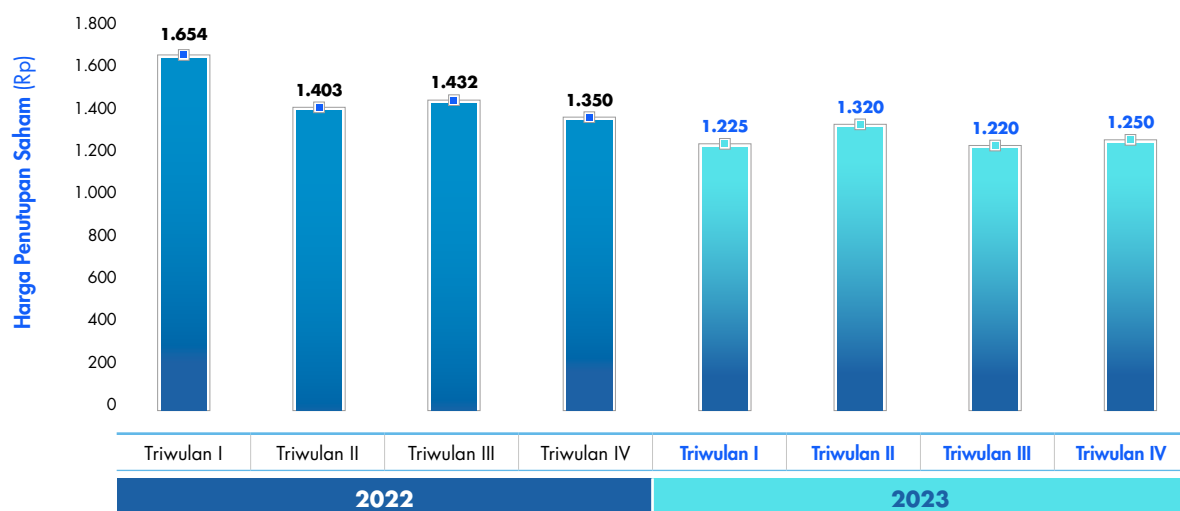
Uraian	2023	2022	2021	2020	2019
PERBANKAN KONSUMER					
Penyaluran Kredit Konsumer	42.450.499	41.795.595	32.948.775	24.812.869	33.439.158
Simpanan Konsumer	63.770.218	68.190.039	68.770.476	65.777.811	65.600.784
PERBANKAN KOMERSIAL					
Penyaluran Kredit Komersial	42.963.396	37.654.912	19.923.399	15.416.031	25.962.288
Simpanan Komersial	243.694.432	223.893.013	197.961.260	189.525.768	137.939.293
UNIT USAHA SYARIAH					
Penyaluran Pembiayaan Syariah	10.625.071	8.213.567	6.232.013	4.658.912	5.302.395
Simpanan Syariah	41.802.885	34.640.775	29.269.336	23.831.409	21.861.284

Informasi Saham

Tabel Harga, Volume dan Kapitalisasi Saham Bank BTN 2022-2023

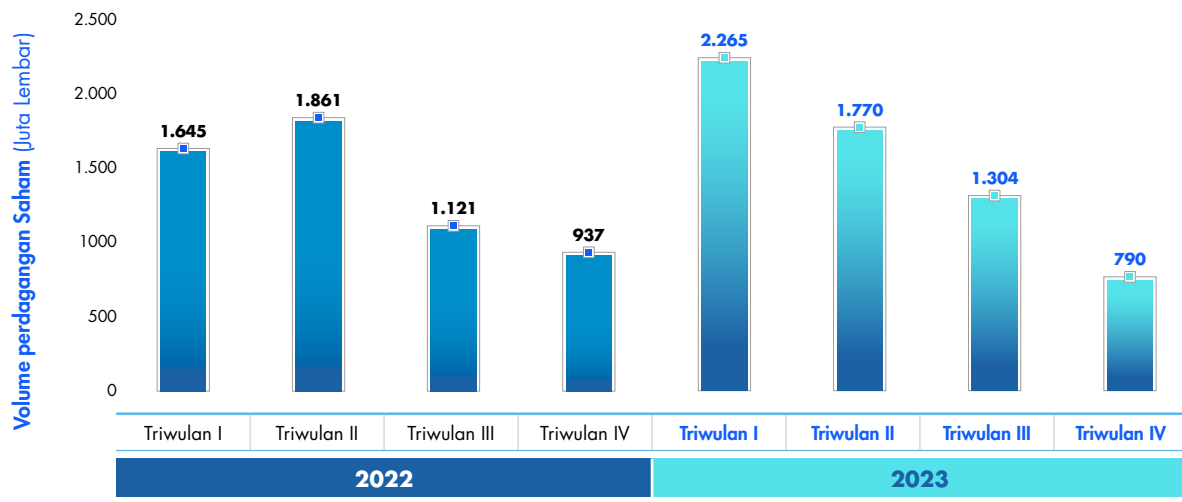
Tahun	Harga per lembar saham (Rp)				Jumlah Saham Beredar (Juta Lembar)	Volume Perdagangan (Juta Lembar)	Kapitalisasi Pasar (Rp Triliun)
	Pembukaan (Rp)	Tertinggi (Rp)	Terendah (Rp)	Penutupan (Rp)			
2023							
Triwulan I	1.335	1.400	1.175	1.225	14,03	2.265	17,19
Triwulan II	1.225	1.340	1.215	1.320	14,03	1.770	18,53
Triwulan III	1.315	1.370	1.220	1.220	14,03	1.304	17,12
Triwulan IV	1.240	1.295	1.190	1.250	14,03	790	17,54
2022							
Triwulan I	1.668	1.750	1.499	1.654	10,59	1.645	18,16
Triwulan II	1.654	1.798	1.403	1.403	10,59	1.861	15,41
Triwulan III	1.403	1.567	1.340	1.432	10,59	1.121	15,73
Triwulan IV	1.432	1.494	1.311	1.350	14,03	937	17,46

Grafik Volume Transaksi Saham Bank BTN Tahun 2022 – 2023

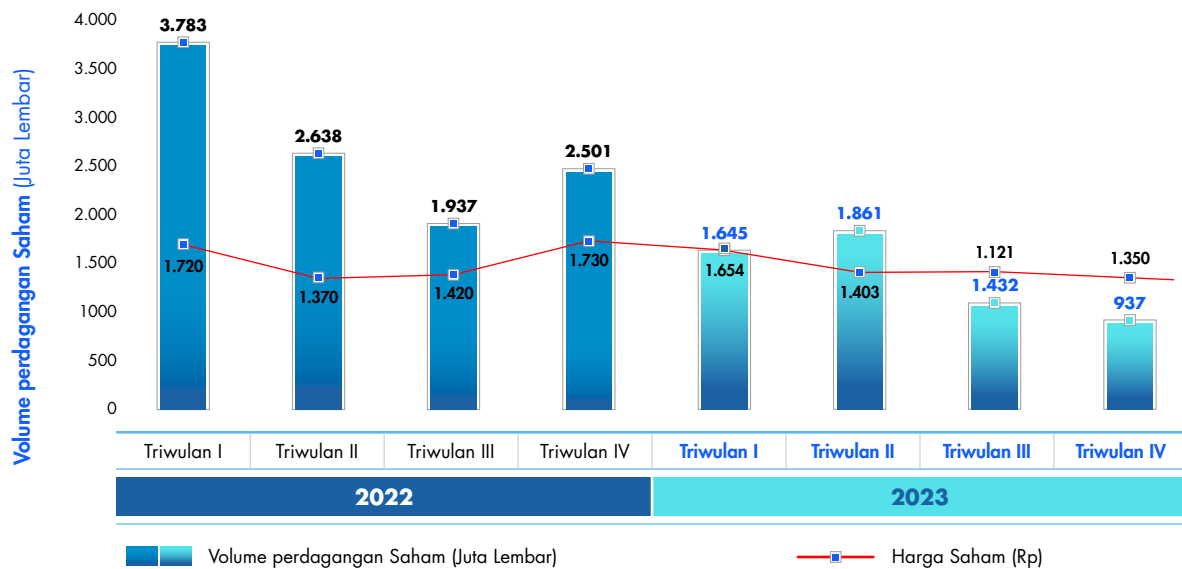




Grafik Volume Perdagangan Saham Bank BTN Tahun 2022-2023



Grafik Pergerakan Harga dan Volume Saham Bank BTN Tahun 2022 – 2023



Tabel Ringkasan Informasi Saham BBTN 2019-2023

Indikator	BBTN 2023	BBTN 2022	BBTN 2021	BBTN 2020	BBTN 2019
Harga Pembukaan (Rp per Lembar Saham)	1.335	1.668	1.735	2.150	2.560
Harga Tertinggi (Rp per Lembar Saham)	1.400	1.798	2.150	2.160	2.790
Harga Terendah (Rp per Lembar Saham)	1.175	1.311	1.230	745	1.795
Harga Penutupan (Rp per Lembar Saham)	1.250	1.350	1.730	1.725	2.120
Volume Perdagangan (Juta Lembar)	5.416	5.563	10.502	16.981	6.076
Nilai Buku Per Saham (Rp)	2.071	2.131	1.988	1.887	2.251
Price to Book Value (kali)	0,60	0,63	0,89	0,91	0,94
Price to Earning Ratio (kali)	5,53	4,73	9,28	11,40	107,29
Jumlah Saham Beredar (Juta Lembar)	14,03	12,87	10,59	10,59	10,59
Kapitalisasi Pasar (Rp Triliun)	17,54	17,46	18,32	18,27	22,45

Sepanjang tahun 2023, Bank BTN berhasil masuk dalam daftar konstituen beberapa Indeks saham terkemuka sebagai berikut:

Indeks	Periode
LQ45	Januari 2023 – Januari 2024
IDX BUMN20	Januari 2023 – Februari 2024
IDX80	Januari 2023 – Januari 2024
IDX Small-Mid Cap (IDX SMC) Composite	Januari 2023 – Februari 2024
IDX Small-Mid Cap (IDX SMC) Liquid	Januari 2023 – Februari 2024
Kompas100	Januari 2023 – Januari 2024
Infobank15	Januari 2023 – Januari 2024
MSCI Indonesia Small Cap	Januari 2023 – Desember 2023
ESG Sector Leaders IDX Kehati	Januari 2023 – Mei 2024
ESG Quality 45 IDX Kehati	Januari 2023 – Mei 2024
IDX Value30	Februari 2023 – Februari 2024
Investor33	Januari 2023 – Mei 2024
IDXFINANCE	Oktober 2022 – Juni 2023
SRI-KEHATI	Juni 2023 – Mei 2024
IDX LQ45 Low Carbon Leaders	Februari 2023 – Februari 2024
TEMPO-IDNFINANCIALS 52	Juni 2023 – Desember 2023

Aksi Korporasi

Sebagai bagian dari rangkaian aksi korporasi Perseroan yang dilakukan di tahun 2022, Perseroan melaksanakan *Rights Issue* dengan tanggal pelaksanaan 28 Desember 2022 sampai dengan 5 Januari 2023 dalam rangka untuk meningkatkan kapasitas bisnis Perseroan, terutama dalam penyaluran kredit perumahan. Pelaksanaan *Rights Issue* ini memperkuat permodalan Perseroan, terutama modal Tier-1 sehingga akan menjaga rasio permodalan di atas batas ketentuan minimum regulator. Adapun rincian pelaksanaan *Rights Issue* Perseroan sebagai berikut:

Tanggal Pelaksanaan	Keterangan	Pemegang Saham (Jumlah Saham yang Beredar)					Jumlah Saham yang Beredar	Harga Saham (Rp)
		Pemerintah		Publik		Nominal		
		Jumlah (lembar)	%	Jumlah (lembar)	%	Rp		
28 Desember 2022 - 5 Januari 2023	Sebelum <i>Rights Issue</i>	6.354.000.000	60	4.236.000.000	40	5.295.000.000.000	10.590.000.000	1.470
	Sesudah <i>Rights Issue</i>	8.420.666.648	60	5.613.777.765	40	7.017.222.206.500	14.034.444.413	1.340

Keterangan: Nilai Nominal saham Rp500/lembar saham

Dari Hasil Pelaksanaan *Rights Issue* sejak 28 Desember 2022 – 5 Januari 2023, jumlah saham yang tereksekusi *Rights*-nya mencapai *oversubscribed* 1,63 kali dari porsi publik, dan jika ditambah dengan porsi Penyertaan Modal Negara (PMN) maka jumlah saham yang tereksekusi *Rights*-nya mencapai *oversubscribed* 1,25 kali.

Informasi Obligasi, Sukuk dan/atau Obligasi Konversi —

Informasi Obligasi

Tabel Obligasi Bank BTN

Uraian	Tanggal distribusi Obligasi secara Elektronik	Tenor (Bulan)	Mata Uang	Jumlah Obligasi (Jutaan Rp)	
Obligasi Berkelanjutan I Bank BTN Tahap II Tahun 2013	27 Maret 2013	10	Rp	2.000.000	
Obligasi Berkelanjutan II Bank BTN Tahap I Tahun 2015 Seri D	8 Juli 2015	10	Rp	800.000	
Obligasi Berkelanjutan III Bank BTN Tahap I Tahun 2017 Seri C	13 Juli 2017	7	Rp	853.000	
Obligasi Berkelanjutan III Bank BTN Tahap I Tahun 2017 Seri D	13 Juli 2017	10	Rp	1.386.000	
Obligasi Berkelanjutan III Bank BTN Tahap II Tahun 2019 Seri C	28 Juni 2019	5	Rp	1.219.500	
Junior Global Bond Bank BTN	23 Januari 2020	5	USD	300	
Obligasi Berkelanjutan IV Bank BTN Tahap I Tahun 2020 Seri B	19 Agustus 2020	3	Rp	727.000	
Obligasi Berkelanjutan IV Bank BTN Tahap I Tahun 2020 Seri C	19 Agustus 2020	5	Rp	196.000	
Obligasi Berkelanjutan IV Bank BTN Tahap II Tahun 2022 Seri A	24 Mei 2022	3	Rp	600.000	
Obligasi Berkelanjutan IV Bank BTN Tahap II Tahun 2022 Seri B	24 Mei 2022	5	Rp	400.000	

Catatan:

- Rating Efek-efek dalam negeri yang masih *outstanding* di Tahun 2021 menggunakan *rating* dari Pefindo.
- Rating Efek-efek dalam negeri yang diterbitkan dan masih *outstanding* di Tahun 2022 menggunakan *rating* dari Fitch.
- Rating Junior Global Bond Bank BTN (USD) yang diterbitkan di Tahun 2020 menggunakan *rating* dari Moody's.
- Rating Efek-efek dalam negeri yang masih *outstanding* di Tahun 2023 menggunakan *rating* dari Pefindo.

Informasi Sukuk

Tabel Sukuk Bank BTN

Uraian	Tanggal Distribusi Sukuk secara Elektronik	Tenor (Bulan)	Mata Uang	Jumlah Sukuk (Jutaan Rp)	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Nisbah	Status Pembayaran	Keterangan
Sukuk BTN I Tahun 2023 Tahap I	28 Juli 2023	159	Rp	92.553	28 Oktober 2036	11,00% dari Pendapatan yang dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 0,55% per tahun.	Belum Jatuh Tempo	Surat Berharga ini tidak di- <i>rating</i> dan tidak dilakukan penawaran umum.
Sukuk BTN I Tahun 2023 Tahap II	27 Desember 2023	156	Rp	175.039	27 Desember 2036	27,40% dari Pendapatan yang dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 1,37% per tahun.	Belum Jatuh Tempo	Surat Berharga ini tidak di- <i>rating</i> dan tidak dilakukan penawaran umum.



Aksi Penghentian Sementara Perdagangan Saham (*Suspension*) dan/atau Penghapusan Pencatatan Saham (*Delisting*)

Sampai dengan 31 Desember 2023, Perseroan tidak pernah dikenakan sanksi penghentian sementara perdagangan saham (*suspension*) dan/atau penghapusan pencatatan saham (*delisting*).

	Harga Penawaran	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Suku Bunga	Status Pembayaran	Peringkat		Wali Amanat
					2023	2022	
	100% dari jumlah pokok Obligasi	27 Maret 2023	7,9%	Lunas	AA+(idn)	AA(idn)	Bank Mega
	100% dari jumlah pokok Obligasi	8 Juli 2025	10,5%	Belum Jatuh Tempo	AA+(idn)	AA(idn)	Bank BJB
	100% dari jumlah pokok Obligasi	13 Juli 2024	8,70%	Belum Jatuh Tempo	AA+(idn)	AA(idn)	Bank Mega
	100% dari jumlah pokok Obligasi	13 Juli 2027	8,90%	Belum Jatuh Tempo	AA+(idn)	AA(idn)	Bank Mega
	100% dari jumlah pokok Obligasi	28 Juni 2024	9,00%	Belum Jatuh Tempo	AA+(idn)	AA(idn)	Bank Mega
	100% dari jumlah pokok Obligasi	23 Januari 2025	4,20%	Belum Jatuh Tempo	Ba3	AA(idn)	Bank BJB
	100% dari jumlah pokok Obligasi	19 Agustus 2023	7,80%	Lunas	AA+(idn)	AA(idn)	Bank BJB
	100% dari jumlah pokok Obligasi	19 Agustus 2025	8,40%	Belum Jatuh Tempo	AA+(idn)	AA(idn)	Bank BJB
	100% dari jumlah pokok Obligasi	24 Mei 2025	5,50%	Belum Jatuh Tempo	AA+(idn)	AA(idn)	Bank BJB
	100% dari jumlah pokok Obligasi	24 Mei 2027	6,0%	Belum Jatuh Tempo	AA+(idn)	AA(idn)	Bank BJB

Informasi Obligasi Konversi

Sampai dengan 31 Desember 2023, Perseroan tidak menerbitkan obligasi konversi, dengan demikian Perseroan tidak memiliki informasi mengenai obligasi konversi.



Informasi Sumber Pendanaan Lainnya

Sekuritisasi KPR

Tabel Sekuritisasi KPR Bank BTN

No.	Transaksi Sekuritisasi	Nominal Total (Rp)	Kelas	Nominal (Rp)	
1.	EBA-SP SMF-BTN 02	1.000.000.000.000	A1	400.000.000.000	
			A2	513.000.000.000	
			B	87.000.000.000	
2.	EBA-SP SMF-BTN 03	1.000.000.000.000	A1	200.000.000.000	
			A2	713.000.000.000	
			B	87.000.000.000	
3.	EBA-SP SMF-BTN 04	2.000.000.000.000	A1	700.000.000.000	
			A2	1.124.000.000.000	
			B	176.000.000.000	
4.	EBA-SP SMF-BTN 05	2.000.000.000.000	A1	574.000.000.000	
			A2	1.142.000.000.000	
			M	24.000.000.000	
			B	260.000.000.000	
5.	EBA-SP SMF-BTN 06	631.000.543.015	A	576.734.000.000	
			B	54.266.543.015	
6.	EBA-SP SMF-BTN 07	500.000.001.416	A	452.500.000.000	
			B	47.500.001.416	
7.	EBA-SP SMF-BTN 08	600.000.020.055	A	544.800.000.000	
			B	55.200.020.055	

Negotiable Certificate of Deposit (NCD)

Tabel Negotiable Certificate of Deposit (NCD) Bank BTN

Jenis NCD	Nominal Penerbitan (Rp)	Tanggal Transaksi	Seri	Jangka Waktu	Jatuh Tempo	Rate	Nominal Per Seri
NCD Tahap I Tahun 2023	1.500.000.000.000	20 Oktober 2023	A	6 bulan	17 April 2024	6,40%	500.000.000.000
			B	9 bulan	16 Juli 2024	6,45%	70.000.000.000
			C	12 bulan	21 Oktober 2024	6,53%	930.000.000.000

	Tanggal Transaksi	Jatuh Tempo	Average Life (Tahun)	Kupon Kelas A	Peringkat Kelas A
	31 Oktober 2016	27 Juni 2027	7,05	A1 = 8,15%	idAAA
				A2 = 8,75%	
	28 April 2017	07 Januari 2028	7,78	A1 = 8,00%	idAAA
				A2 = 8,40%	
	28 Februari 2018	07 Mei 2029	7,03	A1 = 7,00%	idAAA
				A2 = 7,50%	
	27 November 2019	07 Mei 2032	9,09	A1 = 8,50%	idAAA
				A2 = 8,75%	
				M = 10,40%	idA
	30 Desember 2020	07 Juli 2032	6,08	6,50%	idAAA
	23 Desember 2022	07 Januari 2034	5,66	7,70%	idAAA
	26 September 2023	07 Agustus 2035	7,44	6,65%	idAAA



Long Term Notes (LTN)

Tabel Long Term Notes (LTN) Bank BTN

Uraian	Tanggal Distribusi LTN secara Elektronik	Tenor (Bulan)	Jumlah LTN (Rp Ribuan)	
LTN BTN Tahun 2021 Tahap I	17 Desember 2021	186	10.185.851	
LTN BTN II Tahun 2022 Seri A	12 Juli 2022	171	47.740.325	
LTN BTN II Tahun 2022 Seri B	12 Juli 2022	177	79.378.706	
LTN BTN III Tahap I Tahun 2022	14 Desember 2022	177	210.866.282	
LTN BTN III Tahap II Tahun 2022	28 Desember 2022	171	131.184.885	
LTN BTN IV Tahap I Tahun 2023	28 Juli 2023	165	35.898.139	
LTN BTN IV Tahap II Tahun 2023	15 September 2023	168	404.745.014	
LTN BTN IV Tahap III Tahun 2023 Seri A	27 Desember 2023	180	6.241.671	
LTN BTN IV Tahap III Tahun 2023 Seri B	27 Desember 2023	168	234.541.750	

Keterangan: Surat Berharga LTN Bank BTN tidak di-rating dan diterbitkan melalui penawaran terbatas kepada BP Tapera.

Rating Perusahaan 2023

Peringkat Fitch per 6 November 2023

Keterangan	Peringkat
Outlook	Stable
Peringkat Nasional Jangka Panjang	AA+(idn)
Peringkat Nasional Jangka Pendek	F1+(idn)

Peringkat Pefindo per 8 Juni 2023

Keterangan	Peringkat
Outlook	Stable
Peringkat Nasional	idAAA

Rating ESG Sustainalytics Per 5 Desember 2023

Keterangan	Peringkat
ESG Risk Rating	22,9
Kategori	Medium Risk

	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Suku Bunga	Status Pembayaran
	17 Juni 2037	1,37% tetap	Belum Jatuh Tempo
	12 Oktober 2036	1,37% tetap	Belum Jatuh Tempo
	12 April 2037	0,55% tetap	Belum Jatuh Tempo
	14 Juni 2037	0,55% tetap	Belum Jatuh Tempo
	28 Maret 2037	0,55% tetap	Belum Jatuh Tempo
	28 April 2037	0,55% tetap	Belum Jatuh Tempo
	15 September 2037	1,37% tetap	Belum Jatuh Tempo
	27 Desember 2038	0,55% tetap	Belum Jatuh Tempo
	27 Desember 2037	1,37% tetap	Belum Jatuh Tempo



Laporan Analisis Perusahaan

Tabel Laporan Analisis Perusahaan Bank BTN

No	Perusahaan	Kode Broker	Analisis	Rekomendasi	Target Price
1.	UBS Sekuritas	AK	Joshua Tanja	buy	2.175
2.	Ciptadana Sekuritas	KI	Erni M Siahaan	buy	2.125
3.	Bahana Sekuritas	DX	Yusuf Winoto	buy	2.100
4.	Yuanta Investment	FS	Yap Swie Cu	buy	1.980
5.	Kiwoom Securities	AG	Team Coverage	ovrwght	1.957
6.	MNC Sekuritas	EP	Tirta Citradi	buy	1.900
7.	Macquarie Sekuritas	RX	Jayden Vantrakis	buy	1.840
8.	Aldiracita Sekuritas	PP	Agus Pramono	buy	1.800
9.	Mandiri Sekuritas	CC	Kresna Hutabarat	buy	1.800
10.	Valbury Sekuritas	CP	Akhmad Nurcahyadi	buy	1.770
11.	CLSA Securities	KZ	Sarina Lesmina	buy	1.750
12.	UOB Kayhian	AI	Posmarito Pakpahan	buy	1.700
13.	BNI Sekuritas	NI	Yulinda Hartanto	buy	1.700
14.	RHB Research	DR	Andrey Wijaya	buy	1.650
15.	Sucorinvest Central	AZ	Edward Lowis	buy	1.640
16.	Korea Invest & Sekuritas	YJ	Edward Ariadi T.	hold	1.639
17.	Trimegah Sekuritas	LG	Adi Prabowo	buy	1.600
18.	CGS CIMB	YU	Handy Noverdanius	add	1.600
19.	Panin Sekuritas	GR	Nico Laurens	buy	1.600
20.	DBS Bank	DP	Rui Wen Lim	hold	1.550
21.	BCA Sekuritas	SQ	Cristopher Andre B.	buy	1.550
22.	Astronacci International		Gema Merdeka	buy	1.515
23.	Morgan Stanley	YB	Selvie Jusman	Equalwt	1.505
24.	Sinarmas Sekuritas	DH	Arief Machrus	buy	1.480
25.	OCBC Sekuritas	TP	Budi Rustanto	buy	1.450
26.	Indopremier Sekuritas	PD	Anthony	buy	1.440
27.	Verdhana Sekuritas	BB	Erwin Wijaya	neut	1.400
28.	Samuel Sekuritas	IF	Prasetya Gunadi	hold	1.300
29.	BRI Danareksa	OD	Victor Stefano	u. review	-

Peristiwa Penting 2023



18 Januari

BTN Syariah Ekspansi Kantor di Bandar Lampung

Mengawali tahun 2023, BTN Syariah semakin ekspansif melakukan perluasan usaha untuk menggarap potensi bisnis pembiayaan syariah dan mendukung pemerintah dalam meningkatkan ekosistem syariah yang kini makin diminati masyarakat. Perluasan jaringan kantor syariah tersebut juga untuk mempermudah masyarakat Lampung memiliki rumah dengan pembiayaan syariah.



25 Januari

Bank BTN Resmi Jadi Anggota Ekosistem Pembiayaan Perumahan

Penandatanganan MoU Ekosistem Pembiayaan Perumahan menjadi penanda terbentuknya Sekretariat Ekosistem Pembiayaan Perumahan. Sekretariat ini akan mendukung program pemerintah untuk memaksimalkan penyediaan pembiayaan rumah rakyat khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam rangka mencapai *zero backlog* pada 2045.



31 Januari

Bank BTN Sabet Top PLCs dan Asean Asset Class PLCs

Bank BTN meraih dua penghargaan yakni Indonesia Top 3 *Public Listed Companies* (PLCs) Tahun 2021 dan ASEAN Asset Class PLCs. ACGS merupakan ajang bergengsi yang memberikan penghargaan kepada perusahaan yang memiliki penilaian tertinggi dalam penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) di ASEAN.



12 Februari

Bank BTN Resmi Luncurkan SuperApp BTN Mobile

SuperApp BTN Mobile resmi diluncurkan untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan nasabah dalam bertransaksi perbankan dengan menggabungkan kekuatan teknologi dan ekosistem perumahan. Salah satu fitur unggulannya yakni *online open account*, *split bill*, *autodebit*, dan *cashflow tracker*.



14 Februari

Bank BTN Syariah Pontianak Resmi Beroperasi

KCS Pontianak merupakan *outlet* ke 105 dari BTN Syariah untuk melayani masyarakat Pontianak. Dalam 5 tahun ke depan diharapkan KCS Pontianak dapat mengumpulkan Dana Pihak Ketiga di atas Rp38 miliar setiap tahunnya dan ditargetkan pembiayaan dapat tumbuh sekitar Rp60 miliar setiap tahun.



16-19 Februari

Bazar UMKM di Sarinah

Dalam dukungan partisipasi kegiatan Bazar UMKM untuk Indonesia, Bank BTN Bersama Angkasa Pura 1 ditunjuk oleh Kementerian BUMN sebagai pelaksana Bazar UMKM di Gedung Sarinah dan terdapat 81 partisipan yang mengikuti Bazar UMKM.



7 Maret

Bank BTN Dorong Ekosistem Digitalisasi Pasar Tradisional

Bank BTN melakukan ekspansi ke pasar-pasar tradisional salah satunya Pasar Tagog, Padalarang dengan mengimplementasikan digitalisasi pasar melalui BTN Mobile. Bank BTN membuka dan mendekatkan diri dengan pasar sebagai ekosistem perumahan untuk memperkuat sistem pembayaran dan juga inklusi keuangan melalui BTN Mobile sehingga transaksi dari pedagang lebih cepat, lebih murah dan mudah.



20 Maret

Bank BTN Berikan Layanan Perbankan kepada Distributor Semen Indonesia

Bank BTN memberikan layanan perbankan kepada distributor Semen Indonesia Group. Hal ini merupakan tindak lanjut dari Perjanjian Kerja sama Pemberian Fasilitas *Distributor Financing* antara Bank BTN dengan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.



8 April
Tabungan BTN Bisnis Road Show di Pasar Tanah Abang Jakarta

Road Show Tabungan BTN Bisnis diharapkan dapat mempermudah transaksi pengusaha yang ada di Pasar Tanah Abang dalam menjalankan bisnisnya. Tahun ini Bank BTN menargetkan perolehan dana Tabungan BTN Bisnis sebesar Rp7 triliun atau naik 40% dibandingkan tahun lalu.



12 April
BTN Gelar Acara Ramadan Berfaedah

Pada Ramadan tahun ini, Bank BTN mengambil tema "Ramadan Berfaedah" untuk menyampaikan pesan bahwa seyogianya Ramadan bisa menjadi titik tolak untuk perusahaan bertransformasi menjadi lebih baik lagi dan berorientasi untuk selalu memberi faedah atau manfaat. Sebagai upaya memberikan faedah bagi nasabah dan masyarakat, Bank BTN juga terus berupaya memperbaiki layanan, di antaranya memperbarui BTN Mobile dengan fitur yang semakin banyak dan bisa memudahkan berbagai transaksi nasabah selama bulan Ramadan.



16 April
Bank BTN Dukung Pembiayaan Hunian Milenial

Bank BTN mendukung pembiayaan hunian milenial dengan meluncurkan produk yang terjangkau untuk kalangan muda tersebut antara lain KPR BTN Gaess For Millenial, KPR BTN HITS (Hijrah to Syariah) For Millenial dan KPR Rent to Own. Bank BTN membidik sekitar 5,8 juta kaum milenial yang saat ini belum memiliki rumah.



17 April
Gerak Srikandi BTN Berbagi

Dalam acara yang diberi nama Gerakan Amal dan Kreasi (Gerak) Srikandi tersebut, dibagikan sebanyak lebih dari 6.000 paket yang diberikan kepada masyarakat sekitar lingkungan kerja BTN dan karyawan Tenaga Ahli Daya (TAD).



3 Mei

Bank BTN Rilis *BTN Call 150286*

Bank BTN menambah nomor *BTN Call 150286* untuk meningkatkan layanan kepada nasabah sekaligus meningkatkan efisiensi operasional *BTN Call* agar dapat melayani dan menangani pertanyaan dan keluhan nasabah secara cepat dan efektif serta mendukung bisnis melalui telesales.



24 Mei

Bank BTN Kolaborasi dengan Alibaba Cloud Manfaatkan Layanan Komputasi Awan

Kolaborasi dengan Alibaba Cloud merupakan salah satu langkah Bank BTN untuk menjadi inovator dalam mewujudkan transformasi digital yang lebih cepat serta efisien untuk mendukung *BTN Mobile* sebagai *Super App*.



16 Juni

Tingkatkan Market Share KPR, Bank BTN *launching Sales Center*
Sales Center KPR BTN diluncurkan dalam rangka pengelolaan KPR Non Subsidi khusus untuk *Segment Emerging Affluent* yang berasal dari *Developer* dan Proyek Perumahan terpilih. Dengan peresmian *Sales Center* ini diharapkan mampu meningkatkan *market share* KPR Non Subsidi, meningkatkan pendapatan Bank dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

26 Juni

Raih Peringkat Tertinggi Pefindo, Bank BTN Dinilai Miliki Kemampuan Superior

Bank BTN sukses meraih peringkat tertinggi idAAA/*Stable* dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Bank BTN juga dinilai Pefindo sebagai perusahaan yang memiliki kemampuan superior untuk memenuhi komitmen keuangan jangka panjangnya dibandingkan obligor Indonesia lainnya. Sementara itu, Bank BTN tahun ini juga mencatatkan kenaikan peringkat Fitch dari AA menjadi AA+ dan disematkan prospek stabil.



25 Juli

BTN Syariah Dukung Pembiayaan Rumah Bagi Warga Muhammadiyah

Unit Usaha Syariah Bank BTN, berkomitmen memberikan dukungan fasilitas pembiayaan rumah kepada warga Muhammadiyah, termasuk Peserta Pekerja Mandiri melalui skema *Saving Plan*. UUS BTN membidik penyaluran pembiayaan perumahan subsidi (KPR Sejahtera) sekitar Rp500 miliar.



8 Agustus

Bank BTN Tinjau Rumah Subsidi

Peninjauan rumah subsidi dilakukan pada gelaran acara Akad Massal KPR Bank BTN secara serentak di seluruh Indonesia sebanyak 10.000 unit rumah. Pelaksanaan Akad Massal KPR merupakan komitmen Bank BTN dalam menyukseskan Program Sejuta Rumah untuk memenuhi impian masyarakat memiliki rumah yang layak huni.



11 Agustus

Sinergi Bank BTN dan UGM Ajak Mahasiswa Jadi *Entrepreneur*

Bank BTN telah bekerja sama dengan UGM dalam hal pembiayaan Pendidikan seluruh mahasiswa S1 melalui semua Channel Bank BTN. Dalam bidang pendidikan, Bank BTN berharap kerjasama ini dapat melahirkan *developer-developer* muda untuk ikut berpartisipasi membangun perumahan di Indonesia.



25 Agustus

Bank BTN Luncurkan KPR BTN Prioritas

KPR BTN Prioritas merupakan program baru Bank BTN untuk dapat memberikan layanan lebih kepada nasabah prioritas baik dari sisi *funding* maupun *lending*. Dengan suku bunga menarik mulai dari 2,99%, bebas biaya proses, bebas biaya appraisal serta tambahan diskon biaya provisi dan administrasi, Bank BTN optimistis KPR BTN Prioritas dapat memenuhi kebutuhan perumahan bagi nasabah prioritas.



8 September

Fokus UMKM, Bank BTN Resmikan Sentra Proses UMKM

Peresmian Sentra UMKM merupakan wujud komitmen Bank BTN dalam percepatan dan simplifikasi proses sehingga dapat membantu meningkatkan perekonomian UMKM dengan memberikan pembiayaan murah berupa Kredit UMKM dan KUR. Penyaluran kredit kepada UMKM juga diyakini berdampak positif terhadap kinerja Bank BTN.



9 September

Bank BTN dan PSSI Berkolaborasi Sediakan Hunian Layak Bagi Pelaku Olahraga Sepakbola

Kolaborasi antara Bank BTN dan PSSI akan memberikan kemudahan bagi para pelaku olahraga sepakbola untuk bisa memiliki rumah impian yang terjangkau dan layak huni. Pada kesempatan yang sama Bank BTN memberikan persetujuan KPR kepada Indra Sjafrie yang merupakan Direktur Teknik PSSI.



16-19 September

China ASEAN Expo

Bank BTN memfasilitasi mitra binaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Perseroan untuk menjual produk lokal ke pasar China. Langkah tersebut menjadi salah satu bagian dari strategi BTN mendukung Pemerintah termasuk Kementerian BUMN membawa UMKM menembus pasar global. UMKM yang dikirim BTN ke China merupakan binaan dari Rumah BUMN BTN KC Yogyakarta. Rumah BUMN merupakan wadah untuk mendukung pengembangan UMKM di Indonesia melalui berbagai inisiatif maupun sinergi dengan instansi atau lembaga lainnya. Para UMKM tersebut memamerkan produk unggulannya melalui kegiatan China ASEAN EXPO 2023 yang diselenggarakan di Nanning International Conference and Exhibition.



13 Oktober

Bank BTN Syariah Gelar Akad Massal di Aceh

Unit Usaha Syariah (UUS) Bank BTN siap menjadi bank terbesar di Provinsi Aceh. Salah satunya dengan memperbesar pembiayaan perumahan di provinsi yang menerapkan aturan syariat Islam atau Qanun tersebut. Jumlah Akad Massal KPR Syariah Bank BTN Syariah di Aceh sebanyak 2.187 unit rumah yang terdiri dari 1.779 rumah Subsidi dan 364 rumah Non Subsidi ini diikuti oleh 33 Kantor Cabang Syariah (KCS) di seluruh Indonesia.



28 Oktober

Bank BTN Gelar Pelatihan BTN Santri Developer

Tujuan dari BTN Santri Developer adalah guna memberikan edukasi mengenai dunia bisnis properti kepada para santriwan/santriwati alumni pondok pesantren binaan Nahdlatul Ulama.



12 November

Bank BTN Jakarta Run Sukses Digelar

Bank BTN Jakarta Run 2023 menjadi wajah baru kegiatan lari di Jakarta dan menjadi ajang wadah berkumpulnya masyarakat dan komunitas pelari Jakarta guna menggelorakan semangat berolahraga, kebersamaan demi kesehatan yang lebih baik. Adapun kategori lari di BTN Jakarta Run 2023 dibagi menjadi 4 kategori, yaitu *Marathon* (42K), *Half Marathon* (21K), 10K, dan 5K.



6 Desember

Bentuk BTN Fund, Bank BTN Jalin Kerja Sama Dengan Mandiri Capital Indonesia

Bank BTN terus berinovasi untuk mendorong sektor perumahan di Tanah Air. Bank BTN resmi berkolaborasi dengan PT Mandiri Capital Indonesia (MCI) membentuk BTN Fund, sebuah program pendanaan bagi perusahaan rintisan potensial di sektor properti. Selain sektor properti, BTN Fund juga akan berinvestasi di industri terkait seperti *Iproptech*, *Mortgage Tech*, *Fintech*, *Construction Tech*, SaaS, dan sektor strategis lainnya, guna mendukung sektor perumahan di Indonesia.



28 Desember

Bank BTN Penyalur FLPP Tertinggi Tahun 2023

Bank BTN berkomitmen menjadi mitra Pemerintah dan BP Tapera untuk terus berkontribusi pada tahun 2024 mewujudkan mimpi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) memiliki hunian yang layak. BP Tapera memberikan apresiasi kepada Bank BTN dan BTN Syariah sebagai Bank penyalur FLPP tertinggi dan membukakan pertumbuhan tertinggi sepanjang tahun 2023.



LAPORAN DIREKSI, DEWAN KOMISARIS DAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH

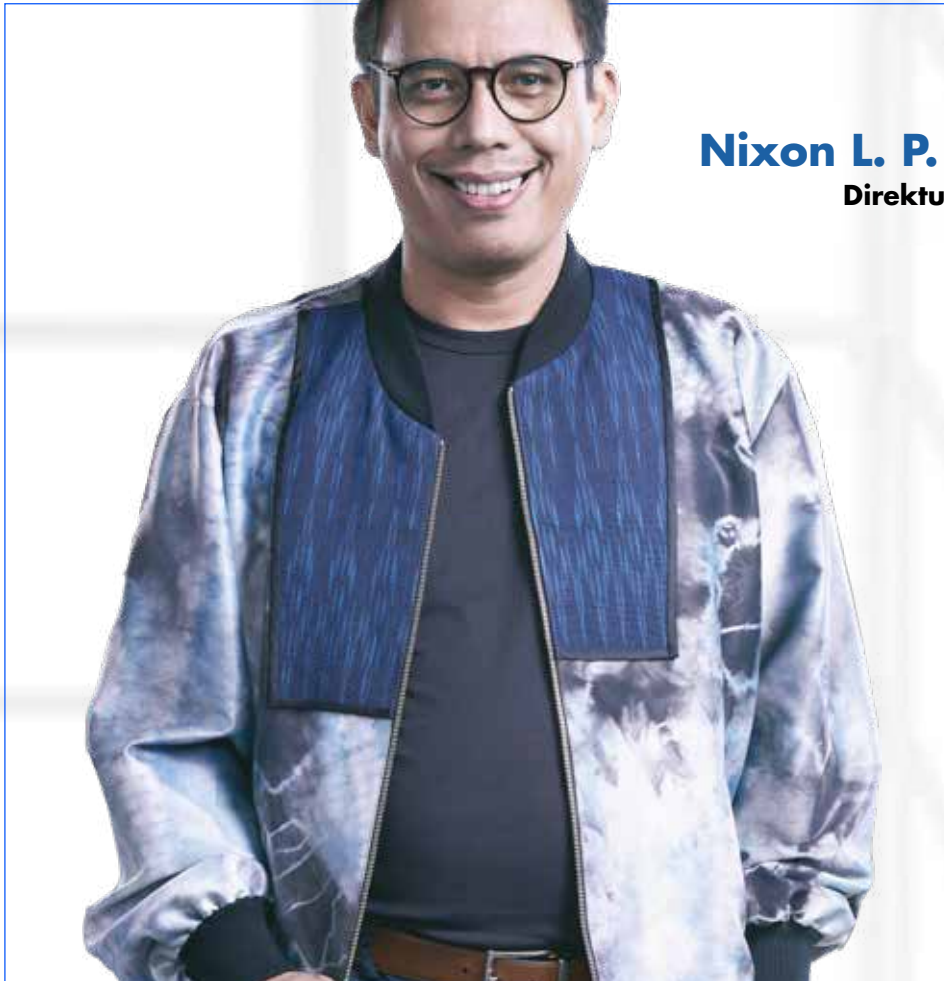


“

Total Aset tahun 2023 adalah sebesar Rp438,75 triliun, meningkat 9,10% dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar Rp402,15 triliun. Ekuitas Bank mencapai sebesar Rp30,47 triliun, meningkat 17,64% dari tahun 2022 sebesar Rp13,95 triliun.



LAPORAN DIREKSI



Nixon L. P. Napitupulu
Direktur Utama

“

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, atas ridhonya Perseroan mampu menunjukkan hasil yang baik di tengah tantangan perekonomian yang masih mengalami ketidakpastian. Di tengah tantangan tersebut, Perseroan tetap konsisten dalam mendukung Pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi, melalui sektor perumahan.

Pemegang saham dan para Pemangku Kepentingan lainnya yang kami hormati,

Pada kesempatan ini, perkenankan kami melaporkan pengelolaan dan kinerja Perseroan selama tahun buku 2023 yang meliputi hasil kinerja Perseroan, analisis prospek perusahaan, perkembangan penerapan tata kelola Perseroan, penilaian kinerja Komite di bawah Direksi serta perubahan komposisi Direksi.

Analisis Atas Kinerja Perseroan

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang Perbankan, Perseroan senantiasa berkomitmen menjadi Bank yang fokus dalam melayani dan mendukung pembiayaan sektor perumahan melalui berbagai produk dan jasa baik konvensional maupun syariah. Berbagai produk dan jasa Perseroan adalah sebagai berikut:

PRODUK KONVENSIONAL

Produk konvensional terdiri dari Produk Konsumer dan Produk Komersial. Produk konsumer terbagi menjadi Produk Kredit Konsumer, Produk Simpanan Konsumer dan Produk *Wealth Management*. Produk Kredit Konsumer meliputi Kredit Perumahan dan Kredit Non Perumahan. Produk Simpanan Konsumer meliputi Tabungan Konsumer, Deposito BTN Ritel dan Giro Perorangan. Sedangkan Produk *Wealth Management* meliputi *Bancassurance*, Reksa Dana, Surat Berharga Negara Ritel Pasar Perdana, Surat Berharga Negara Pasar Sekunder serta *Foreign Exchange*.

Produk Komersial terbagi menjadi Produk Kredit Komersial, Produk Simpanan Komersial serta Produk Korporasi. Produk Kredit Komersial meliputi, Kredit Modal Kerja, Kredit Modal Kerja Kontraktor, Kredit Modal Kerja Konstruksi, Kredit Pemilikan Lahan, Kredit *Linkage*, Kredit Beragungan Simpanan dan Kredit Investasi. Produk Simpanan Komersial meliputi Deposito Berjangka Lembaga dan Giro Lembaga. Sedangkan Produk Korporasi meliputi, Kredit Modal Kerja, Kredit Investasi, *Refinancing*, Pinjaman Dalam Negeri (PDN), *Term Loan Facility*, *Corporate Line Facility*, *Treasury Line Facility*, *Supply Chain Financing* (SCF), *Trust Receipt*, *Letter of Credit* (L/C) atau Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN), Garansi Bank BTN, dan *Documentary Collection*.

PRODUK SYARIAH

Produk Syariah terdiri dari Produk Pembiayaan Syariah dan Produk Simpanan Syariah. Produk Pembiayaan Syariah meliputi, Pembiayaan Konsumer dan Pembiayaan Komersial. Sedangkan Produk Simpanan Syariah meliputi, Giro Syariah, Tabungan Syariah dan Deposito Syariah.

JASA KONVENSIONAL

Pada sisi Konvensional, Perseroan memberikan berbagai jasa seperti *Electronic Data Capture* (EDC), *Branchless Banking*, BTN Cash Management, BTN Smart Residence, *Virtual Account*,

Online Onboarding Open Account, Kartu Debit Visa/GPN & Debit Online, SMS Notifikasi, *Internet Banking*, CRM, Portal BTN Properti, *Mobile Banking*, SKBDN, Garansi Bank BTN serta Jasa dan Layanan Perbankan Lainnya.

JASA SYARIAH

Pada sisi Syariah, Perseroan memberikan berbagai jasa seperti, *Safe Deposit Box* BTN iB, Garansi Bank BTN iB, Program Pengembangan Operasional BTN iB, SPP Online BTN iB, Penerimaan Biaya Perjalanan Haji, *Mobile Banking*, Kartu Debit Visa/GPN Syariah dan Debit *Online*, *Payroll* BTN iB serta Kiriman Uang.

Untuk mengoptimalkan produk dan jasa kepada nasabah, Perseroan telah memiliki jaringan kerja yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia antara lain Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua. Per 31 Desember 2023, Perseroan memiliki jaringan Perbankan Konvensional sebanyak, 6 (enam) Kantor Wilayah, 81 Kantor Cabang, 541 Kantor Cabang Pembantu (KCP) dan 3 (tiga) Kantor Fungsional. Sedangkan untuk jaringan Perbankan Syariah, Perseroan memiliki 34 Kantor Cabang Syariah dan 75 Kantor Cabang Pembantu Syariah.

Sejalan dengan Visi dan Misi Bank BTN pada Tahun 2025 yaitu "Menjadi *The Best Mortgage Bank in Southeast Asia*", di Tahun 2023 telah ditetapkan 14 Tema Inisiatif Strategis *Corporate Plan* sebagai implementasi Transformasi, yang terbagi dalam 4 (empat) Area Utama, yaitu *Funding*, *Lending*, *Digital* dan *Enabler*. Guna mendukung implementasi transformasi tersebut, pada tahun 2023 telah dilakukan *improvement business process* dan perbaikan di *area enabler*, yang salah satunya adalah adanya penyesuaian dan perubahan struktur organisasi baik di Kantor Pusat, Kantor Wilayah dan Kantor Cabang.

Sebagai perusahaan yang terus bertumbuh, maka keberlanjutan (*sustainability*) merupakan tujuan yang wajib dicapai dalam mengelola keberlangsungan bisnis. Dengan mempertimbangkan keseimbangan antara *profit*, *planet* dan *people*, maka Bank BTN menganggap perlu mengembangkan *Environment, Social and Governance* (ESG) yang sejalan dengan regulasi serta selaras dengan strategi bisnis. Untuk mengimplementasikan tujuan tersebut, pada tahun 2023 telah dibentuk Komite ESG yang merupakan Komite di bawah Direksi dan Departemen ESG di Divisi Enterprise and ESG Risk Management.

Di area bisnis khususnya di bidang *lending*, terdapat perubahan struktur organisasi dengan dibentuknya Divisi Personal Banking. Pembentukan divisi baru ini dilatarbelakangi dengan melihat peluang bisnis *high yield loan* khususnya di segmen konsumer yang semakin berkembang. Di area *support* khususnya di bidang *collection*, terdapat pemisahan fungsi *Consumer Collection*, *Recovery & Asset Sales* di Kantor Pusat menjadi 2



(dua) divisi. Divisi Consumer Collection, Recovery & Asset Sales 1 bertanggungjawab atas pengelolaan *front end* dan *early bucket*, sedangkan Consumer Collection, Recovery & Asset Sales 2 mengelola *middle to end bucket collection*. Sejalan dengan transformasi di bidang *collection*, untuk efisiensi proses pengelolaan dan penjualan aset, maka dilakukan penggabungan 2 (dua) Divisi Commercial Asset Management menjadi 1 (satu).

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, Perseroan memiliki sebanyak 12.045 pegawai. Per 31 Desember 2023, sebanyak 535 Pegawai berjenjang pendidikan Pasca Sarjana, 9.881 Pegawai berjenjang pendidikan Sarjana, 734 Pegawai berjenjang pendidikan Sarjana Muda serta 228 Pegawai berjenjang pendidikan SLTA. Perseroan senantiasa melakukan program pengembangan SDM untuk memenuhi kompetensi dan keahlian yang dibutuhkan Pegawai secara berkesinambungan dengan metode pendidikan, pelatihan, penugasan khusus maupun program mutasi dan promosi. Pengembangan kompetensi pegawai dilakukan melalui program pembelajaran dan pengembangan yang sistematis untuk meningkatkan pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*) dan sikap (*attitude*).

Perseroan juga secara berkala melakukan inovasi teknologi informasi untuk mendukung bisnis Perseroan. Adanya tuntutan kebutuhan akan teknologi serta peningkatan transaksi dan layanan digital Perseroan, membuat organisasi harus cepat merespon perubahan-perubahan yang terjadi, pesatnya perkembangan teknologi informasi membuat organisasi harus cepat beradaptasi. Salah satunya terkait dengan infrastruktur yang merupakan pondasi dari sebuah organisasi dan mencakup keseluruhan layanan, oleh karena itu dibutuhkan infrastruktur teknologi informasi yang handal.

Selama tahun 2023, Perseroan memiliki beberapa fokus untuk meningkatkan IT *service excellence*, hal tersebut dilakukan guna menjaga keberlangsungan usaha dan keamanan informasi Perseroan secara berkelanjutan. Salah satu strategi yang dilakukan oleh Perseroan adalah melakukan *improvement* dan penguatan dari sisi infrastruktur secara berkesinambungan dari tahun ke tahun melalui penguatan IT *monitoring*, implementasi standarisasi, *backup management system* serta modernisasi infrastruktur.

Pada tahun 2023, Perseroan juga fokus pada upaya meningkatkan *elastic and resilient infrastructure*, hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan ketahanan dan kemampuan untuk bangkit dan pulih apabila terjadi gangguan atau *disaster*, inisiatif yang dijalankan di antaranya:

1. *Cloud journey*, melakukan *cloud readiness assessment*, strategi dan arsitektur *cloud* yang akan diterapkan, *platform* dan *security* serta *operational integration*.
2. Implementasi teknologi *cloud computing*.
3. Rutin melakukan uji coba kesiapan *data center* untuk aplikasi-aplikasi *critical* maupun *non critical* secara berkala.
4. Melakukan *DC assessment* untuk menelaah kondisi arsitektur TI secara komprehensif dan mendapatkan strategi *roadmap* untuk mendapatkan infrastruktur TI yang *elastic* dan *resilient*.

Dengan berbagai sumber daya yang dimiliki Perseroan, Direksi telah melakukan pengelolaan secara efektif terhadap sumber daya tersebut. Perseroan telah menghasilkan kinerja yang baik di tahun 2023 di tengah kondisi perekonomian yang masih belum sepenuhnya pulih. Direksi senantiasa mempertimbangkan kondisi perekonomian baik global, nasional maupun industri perbankan dalam mengembangkan strategi bisnis, sehingga mampu mengatasi kendala-kendala khususnya yang terkait dengan dampak kondisi perekonomian terhadap bisnis Perseroan. Oleh karena itu, dalam menyampaikan analisis kinerja Perseroan, izinkan kami menyampaikan telaah perekonomian baik di tingkat global, nasional maupun pada industri perbankan.

Tinjauan Makro Ekonomi

Pada tahun 2023, kondisi ekonomi global sedikit tertahan sebagai dampak dari ketegangan politik Rusia dan Ukraina. Hal ini menyebabkan naiknya harga komoditas dan energi, yang menyebabkan inflasi yang mendorong Bank Sentral dari banyak negara menaikkan suku bunga acuannya untuk mengendalikan inflasi di masing-masing negara. Menjelang akhir tahun 2023 kondisi ekonomi global menunjukkan perbaikan, inflasi dan suku bunga acuan di beberapa negara perlahan diturunkan. Sebaliknya, pada tahun 2024, ekonomi negara berkembang seperti Indonesia dan India diperkirakan akan tetap tumbuh melebihi capaian tahun 2023. Untuk ekonomi pada negara maju seperti Amerika Serikat dan Jepang diperkirakan akan tumbuh lebih lambat dibandingkan tahun 2023. Ekonomi Tiongkok pada tahun 2024 juga diperkirakan akan melambat.

Dari sisi nasional, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Triwulan III tahun 2023 kembali mencatatkan hasil positif sebesar 4,94% yoy, sedikit lebih rendah jika dibandingkan triwulan sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di bawah 5%, setelah telah tujuh triwulan berturut-turut mencatatkan capaian di atas 5%. Hal ini menandakan ekonomi Indonesia semakin pulih dan solid. Dari sektoral, pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor Transportasi dan Pergudangan, disusul sektor Jasa lainnya. Sementara dari sisi pengeluaran, komponen Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah tangga (LNPRM) mengalami pertumbuhan paling tinggi disusul komponen Investasi/PMTB serta konsumsi rumah tangga.

Perbaikan ekonomi nasional diperkirakan akan terus berlanjut hingga Triwulan IV tahun 2023. Perkembangan *leading indicators* hingga Desember 2023 masih menunjukkan hasil yang positif, seperti Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang masih tinggi sebesar 123,8, PMI Manufaktur yang masih berada pada level ekspansi sebesar 52,3 serta Indeks Penjualan Ritel yang mencapai 217,9. Pada Januari 2024, World Bank tetap mempertahankan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2023 sebesar 5,0% dan proyeksi untuk 2024 menjadi sebesar 4,9%. Hal ini dipicu oleh masih berlanjutnya tekanan inflasi global serta ketidakpastian pasar keuangan global yang menyebabkan perlambatan ekonomi nasional. Sementara di sisi moneter, setelah Bank Indonesia mempertahankan suku bunga sebesar 5,75% selama 8 (delapan) bulan berturut-turut, Bank Indonesia

menaikkan suku bunga acuannya sebesar 25 bps menjadi 6,00% pada Oktober 2023 untuk memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah. Selain itu, kenaikan ini juga sebagai langkah *pre-emptive* dan *forward looking* untuk memitigasi dampaknya terhadap inflasi barang impor, sehingga inflasi umum dan inti tetap terkendali dalam sasaran Bank Indonesia.

Selaras dengan perekonomian nasional, likuiditas industri perbankan pada November 2023 dalam level yang memadai dengan rasio-rasio likuiditas yang terjaga. Rasio Alat Likuid/Non-Core Deposit (AL/NCD) sebesar 115,73%, meningkat dibandingkan Oktober 2023 yang sebesar 117,29% atau jauh di atas ambang batas ketentuan yang sebesar 50%. Sementara Alat Likuid/DPK (AL/DPK) sebesar 26,04%, meningkat dibandingkan capaian pada Oktober 2023 yang sebesar 26,36%, masih di atas ambang batas ketentuan yang sebesar 10%. Sementara,

Posisi Devisa Neto (PDN) November 2023 tercatat sebesar 1,58%, juga jauh di bawah *threshold* sebesar 20%. Sementara dari sisi permodalan, *Capital Adequacy Ratio* (CAR) industri Perbankan pada November 2023 tercatat meningkat menjadi 27,89% dari posisi Oktober 2023 yang sebesar 27,44%.

Berdasarkan analisis perekonomian dan industri serta memperhatikan tantangan yang ada, maka Perseroan menetapkan target pasar untuk kredit dan pembiayaan yang diberikan sebesar Rp329,83 triliun dan sebesar Rp347,13 triliun untuk dana pihak ketiga. Berdasarkan target pasar tersebut, Perseroan menargetkan pendapatan bunga sebesar Rp27,73 triliun di tahun 2023.

Untuk mencapai target pasar tersebut, telah ditetapkan suku bunga dasar kredit tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel Suku Bunga Dasar Kredit

Uraian	SDBK Berdasarkan Segmen Bisnis				
	Kredit Korporasi	Kredit Ritel	Kredit Mikro	Kredit Konsumsi	
				KPR	Non KPR
Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) Tahun 2023	8,05%	8,30%	n/a	7,30%	8,80%
Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) Tahun 2022	8,00%	8,25%	n/a	7,25%	8,75%
Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) Tahun 2021	8,00%	8,25%	n/a	7,25%	8,75%
Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) Tahun 2020	9,90%	9,90%	n/a	9,95%	11,25%
Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) Tahun 2019	11,00%	11,25%	n/a	10,75%	11,50%

Selain itu, Bank BTN juga telah menetapkan suku bunga untuk tabungan deposito dan giro yang bersaing dan kompetitif disajikan sebagai berikut:

Tabel Suku Bunga Tabungan Rupiah

Jenis Produk	Strata Saldo	Suku Bunga Ritel	Suku Bunga Lembaga
Tabungan Investa	Sampai dengan Rp1 juta	0,00%	0,00%
	> Rp1 juta - Rp100 juta	1,00%	1,00%
	> Rp100 juta - Rp1 miliar	2,40%	2,25%
	> Rp1 miliar - Rp2 miliar	3,15%	3,05%
	> Rp2 miliar - Rp5 miliar	3,40%	3,20%
	> Rp5 miliar - Rp10 miliar	4,15%	3,45%
	> Rp10 miliar	4,15%	3,90%

Tabel Suku Bunga Tabungan Rupiah

Jenis Produk	Strata Saldo	Suku Bunga
Tabungan BTN Batara	< Rp1 juta	0,00%
	≥ Rp1 juta - ≤ Rp50 juta	0,10%
	> Rp50 juta - ≤ Rp500 juta	0,10%
	> Rp500 juta - ≤ Rp1 miliar	0,50%
	> Rp1 miliar - ≤ Rp2 miliar	1,00%
	> Rp2 miliar	1,00%



Jenis Produk	Strata Saldo	Suku Bunga
Tabungan BTN Bisnis	< Rp1 juta	0,00%
	≥ Rp1 juta - < Rp50 juta	0,50%
	≥ Rp50 juta - < Rp500 juta	1,00%
	≥ Rp500 juta - < Rp1 miliar	1,25%
	≥ Rp1 miliar	1,75%
Tabungan BTN Prima	≤ Rp5 juta	0,00%
	> Rp5 juta - Rp10 juta	0,00%
	> Rp10 juta - Rp100 juta	0,25%
	> Rp100 juta - Rp500 juta	0,50%
	> Rp500 juta - Rp2 miliar	0,75%
	> Rp2 miliar - Rp5 miliar	1,00%
	> Rp5 miliar	1,25%
Tabungan BTN Junior	≤ Rp50 ribu	0,00%
	> Rp50 ribu	0,50%
TabunganKu	Rp0 - Rp500 ribu	0,00%
	> Rp500 ribu - Rp1 juta	0,10%
	> Rp1 juta	0,25%
Tabungan SiMuda RumahKu	Sampai dengan Rp10 juta	1,00%
	> Rp10 juta - Rp25 juta	1,15%
	> Rp25 juta - Rp50 juta	1,25%
	> Rp50 juta - Rp100 juta	1,35%
	> Rp100 juta - Rp250 juta	1,50%
	> Rp250 juta	2,00%
Tabungan BTN Siap!	< Rp1 juta - Rp10 juta	1,00%
	> Rp10 juta - Rp25 juta	1,15%
	> Rp25 juta - Rp50 juta	1,25%
	> Rp50 juta - Rp100 juta	1,35%
	> Rp100 juta - Rp250 juta	1,50%
	> Rp250 juta	2,00%
Tabungan BTN e'BataraPos	< Rp1 juta	0,00%
	≥ Rp1 juta - Rp50 juta	0,10%
	> Rp50 juta - Rp500 juta	0,10%
	> Rp500 juta - Rp1 miliar	0,50%
	> Rp1 miliar	1,00%
Tabanas Batara Kantor Pos		0,00%

Tabel Suku Bunga Giro Rupiah

Jenis Produk	Strata Saldo	Suku Bunga
Giro Rupiah	≤ Rp10 juta	0,00%
	> Rp10 juta - Rp100 juta	0,25%
	> Rp100 juta - Rp500 juta	0,75%
	> Rp500 juta - Rp1 miliar	1,00%
	> Rp1 miliar	1,25%

Tabel Suku Bunga Deposito Rupiah

Jenis Produk	Strata Saldo	Jangka Waktu (bulan)						
		1	2	3	4	6	12	24
Deposito Rupiah	< Rp1 juta	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Rp1 juta - < Rp10 juta	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
	Rp10 juta - < Rp100 juta	2,25%	2,40%	2,65%	2,65%	2,90%	2,90%	2,90%
	≥ Rp100 juta - < Rp500 juta	2,40%	2,40%	2,90%	2,90%	3,05%	3,05%	3,05%
	≥ Rp500 juta - ≤ Rp2 miliar	2,40%	2,40%	2,90%	2,90%	3,05%	3,05%	3,05%
	> Rp2 miliar	2,40%	2,40%	2,90%	2,90%	3,05%	3,05%	3,05%

Tabel Suku Bunga e-Deposito Rupiah

Jenis Produk	Strata Saldo	Jangka Waktu (bulan)						
		1	2	3	4	6	12	24
e-Deposito Rupiah	< Rp100 juta	2,60%	2,75%	3,00%	3,00%	3,25%	3,25%	3,25%
	≥ Rp100 juta - < Rp500 juta	2,65%	2,75%	3,25%	3,25%	3,40%	3,40%	3,40%
	≥ Rp500 juta - < Rp2 miliar	4,25%	4,25%	4,40%	4,50%	4,65%	3,40%	3,40%
	≥ Rp2 miliar - < Rp5 miliar	4,50%	4,50%	4,65%	4,80%	4,90%	3,40%	3,40%
	≥ Rp5 miliar - < Rp10 miliar	4,60%	4,60%	4,80%	4,90%	5,00%	3,50%	3,50%
	≥ Rp10 miliar	4,70%	4,70%	5,00%	5,00%	5,00%	3,60%	3,60%

Tabel Suku Bunga Tabungan Valas

Jenis Produk	USD		SGD		AUD / CNY		JPY	
	Strata Saldo	Suku Bunga	Strata Saldo	Suku Bunga	Strata Saldo	Suku Bunga	Strata Saldo	Suku Bunga
Tabungan BTN Felas	< USD 1.000	0,00%	All tiering	0,10%	All tiering	0,05%	All tiering	0,00%
	USD 1.000 - < USD 10.000	0,15%						
	USD 10.000 - < USD 100.000	0,35%						
	≥ USD 100.000	0,50%						

Tabel Suku Bunga Tabungan Valas

Jenis Produk	USD	
	Strata Saldo	Suku Bunga
Tabungan BTN Felas USD via Mobile Banking	< USD 1.000	0,00%
	USD 1.000 - < USD 10.000	0,15%
	USD 10.000 - < USD 100.000	0,35%
	≥ USD 100.000	0,50%



Tabel Suku Bunga Deposito Valas

Jenis Produk	Strata Saldo	Jangka Waktu (bulan)					
		1	3	4	6	12	24
Deposito USD	Seluruh strata	0,20%					
Deposito SGD	Seluruh strata	0,10%					
Deposito AUD/CNY	Seluruh strata	0,10%					
Deposito JPY	Seluruh strata	0,00%					

Tabel Suku Bunga e-Deposito Valas

Jenis Produk	Strata Saldo	Jangka Waktu (bulan)						
		1	2	3	4	6	12	24
e-Deposito USD	< USD100.000	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
	USD100.000 - < USD500.000	2,50%	2,50%	1,50%	1,50%	1,50%	2,50%	2,50%
	USD500.000 - < USD1.000.000	2,50%	2,50%	2,00%	2,00%	2,00%	2,50%	2,50%
	≥ USD1.000.000	2,50%	2,50%	2,25%	2,25%	2,25%	2,50%	2,50%

Tabel Suku Bunga Giro Valas

Jenis Produk	Strata Saldo	Suku Bunga
Giro Valas (USD)	Sampai dengan USD100.000	0,00%
	> USD100.000	0,10%

Strategi dan Kebijakan Strategis

Direksi memimpin langsung perumusan strategi Perseroan melalui berbagai rapat antara Direksi dengan pada manajemen kunci. Strategi tertuang dalam Rencana Bisnis Bank (RBB). Sedangkan rencana untuk jangka panjang tertuang dalam Corporate Plan Tahun 2021-2025. Dalam pelaksanaannya, Direksi senantiasa dilakukan evaluasi untuk memastikan efektivitas penerapan strategi yang telah ditetapkan melalui berbagai evaluasi laporan internal serta rapat-rapat bersama para kepala Divisi.

Dalam menghadapi berbagai tantangan dan dalam menangkap peluang, Perseroan berupaya meningkatkan kontribusinya pada sektor perumahan dan mendukung *roadmap* transformasi Kementerian BUMN dengan menetapkan visi Menjadi *The Best Mortgage Bank in Southeast Asia* pada tahun 2025 dengan aspirasi bisnis Perseroan yang ingin dicapai di tahun 2025. Pada tahun 2023, telah dirumuskan strategi sebagai berikut:

1. Pada bidang perkreditan, telah dikembangkan strategi pengembangan program kepemilikan hunian yang terjangkau untuk mendukung program perumahan nasional, pengembangan pangsa pasar KPR di segmen *emerging affluent* dan *affluent* dan memperluas *value chain real estate* yang menysasar UMKM dan Kontraktor.
2. Pada bidang kualitas kredit dan pembiayaan, inisiatif strategis yang dilakukan pada jangka pendek dan menengah meliputi perbaikan proses bisnis kredit, meningkatkan kualitas dan efektivitas *collection* dan mempercepat penyelesaian kredit macet secara *bulk* (Strategi Aset Sales).
3. Pada bidang pendanaan, inisiatif strategis yang dilakukan pada jangka pendek dan menengah meliputi pengembangan kapabilitas sebagai bank transaksional dan *channel* transaksi, serta menjadi bank operasional pengelolaan dana institusi.
4. Pada bidang pendapatan operasional lainnya, untuk meningkatkan profitabilitas, rencana bisnis Bank BTN pada tiga tahun ke depan juga difokuskan untuk meningkatkan Pendapatan Operasional Lainnya (POL) yang sebagian besar bersumber dari *fee based income*, terutama pada sumber-sumber baru yang berbasis transaksi dan layanan. Untuk memperkuat bisnis inti bank dan inisiatif dalam mendukung sinergi BUMN, pada jangka menengah pengembangan bisnis juga dilakukan dengan rencana pendirian anak perusahaan atau strategi anorganik melalui rencana penyertaan modal di bidang manajemen investasi, perusahaan modal ventura, asuransi, pendirian anak perusahaan *multifinance* dan kerja sama untuk mengembangkan bisnis Unit Usaha Syariah (UUS). Rencana pendirian anak perusahaan Manajemen Investasi (MI) direncanakan dilakukan dengan skema penyertaan modal pengendalian langsung, dalam hal ini kandidat perusahaan yang direncanakan adalah perusahaan manajemen investasi yang merupakan salah satu anak perusahaan BUMN.
5. Pada bidang bisnis syariah, Berdasarkan laporan *The Royal Islamic Strategic Studies Centre* (RISSC) yang bertajuk *The Muslim 500: The World's 500 Most Influential Muslims 2024*, Indonesia merupakan negara dengan populasi

muslim terbanyak di dunia. RISSC mencatat, jumlah populasi muslim di Indonesia mencapai 240,62 juta jiwa pada 2023. Sebagai negara dengan umat muslim terbesar, industri keuangan syariah Indonesia menyimpan potensi yang sangat besar. Konsep bank syariah saat ini relevan dengan bisnis perbankan retail seperti pembiayaan KPR maupun UMKM yang menjadi salah satu nadi perekonomian Indonesia. Sejalan dengan potensi perbankan syariah nasional, Unit Usaha Syariah (UUS) Bank BTN mengalami pertumbuhan bisnis yang searah. Hal ini ditunjukkan oleh kinerja yang terus tumbuh dan kemampuan UUS Bank BTN yang tetap tumbuh di tengah tantangan pandemi.

6. Pada bidang permodalan, untuk mendukung pertumbuhan bisnis yang sehat dan berkelanjutan dibutuhkan dukungan permodalan yang kuat dengan mempertimbangkan pemenuhan kewajiban modal minimum bank sesuai Basel III. Sesuai dengan POJK No. 11/POJK.03/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum berikut perubahannya, bahwa bank harus menyediakan modal berupa modal minimum berdasarkan peringkat risiko dan tambahan modal sebagai penyangga berdasarkan Basel III (terdapat 3 (tiga) jenis yaitu *capital conservation buffer*, *countercyclical buffer*, dan *capital surcharge*).
7. Pada bidang *human capital*, dalam rangka mewujudkan “One of Home of Indonesia’s Best Talent”, pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pada jangka pendek dan menengah diselaraskan dengan *Corporate Plan* Tahun 2021-2025. Rencana jangka menengah bidang SDM bertujuan untuk menarik dan mempertahankan talenta terbaik yang memiliki kapabilitas unggul dan produktivitas yang tinggi. Sebagai upaya mewujudkan aspirasi tersebut, dirumuskan dimensi dan parameter yaitu, *Ability to Attract Top Talent*, *Ability to Retain Top Talents*, *Talent’s Capability Readiness* dan *Employee Productivity*.
8. Pada bidang infrastruktur TI, untuk mendukung *corporate plan*, aspirasi bisnis serta visi Bank BTN sebagai “Menjadi *The Best Mortgage Bank in Southeast Asia* pada tahun 2025”, Bank BTN telah menyusun enam tema pada rencana strategis TI tahun 2021-2025. Pada tahun 2023, Bank BTN mengusung tema utama yaitu *Expand the Transformation* yang melanjutkan eksekusi *upgrade/replace* dan atau *enhancement* terhadap sistem-sistem kritikal yang telah diidentifikasi. Pada tema ini Bank BTN melanjutkan pengembangan sistem (seperti *digital channel*) *agile based*.
9. Pada bidang *good corporate governance* (GCG), *risk management* dan *compliance*, Perseroan melakukan penguatan struktur organisasi dan proses bisnis yang berlandaskan prinsip-prinsip GCG secara konsisten terus dilakukan melalui penguatan empat pilar utama implementasi GCG yaitu: (i) *Commitment on Governance*; (ii) *Governance Structure*; (iii) *Governance Process*, dan (iv) *Governance Outcome*.

10. Pada bidang pengembangan jaringan (*delivery channel*), dilakukan melalui pengembangan kuantitas dan ragam *channel* dengan strategi perluasan jaringan yang difokuskan pada empat inisiatif utama, yaitu strategi regionalisasi, ekspansi cabang, *agent banking* dan *digital channel*.

Pencapaian Target Kinerja

Berdasarkan strategi yang telah diterapkan, pada tahun 2023 Perseroan telah menghasilkan kinerja yang baik sesuai dengan yang ditargetkan. Analisis kinerja Perseroan disajikan sebagai berikut.

Kinerja Operasional dan Keuangan

Dari sisi operasional, segmen usaha Perseroan berdasarkan jenis usaha mencakup 2 (dua) segmen utama, yaitu segmen Konvensional dan segmen Syariah. Segmen konvensional terdiri dari produk konsumen dan produk komersial. Nilai penyaluran produk Kredit Konsumer tahun 2023 sebesar Rp42,45 triliun, meningkat 1,57% dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar Rp41,79 triliun. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan penyaluran Kredit Perumahan dari KPR Non Subsidi dan Kredit Perumahan Lainnya. Jumlah nilai Produk Komersial tahun 2023 sebesar Rp286,66 triliun, meningkat 9,60% dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar Rp261,55 triliun. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan penyaluran produk Kredit Komersial sebesar 21,02% dan produk Simpanan Komersial sebesar 7,68%. Nilai penyaluran Kredit Komersial tahun 2023 sebesar Rp42,96 triliun, meningkat 14,10% dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar Rp37,65 triliun. Jumlah dana produk Simpanan Komersial tahun 2023 sebesar Rp243,69 triliun, meningkat 8,84% dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar Rp223,89 triliun. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh pertumbuhan Giro Komersial sebesar 23,33%.

Dari sisi syariah, jumlah posisi nilai penyaluran Pembiayaan Syariah tahun 2023 sebesar Rp37,11 triliun. Angka ini meningkat 17,36% dibanding penyaluran pembiayaan di tahun 2022. Peningkatan tersebut disebabkan kenaikan kontribusi pertumbuhan dari pembiayaan konsumen sebesar Rp5,59 triliun yang meningkat sebesar 19,16% dibandingkan tahun 2022. Jumlah posisi dana Simpanan Syariah tahun 2023 adalah sebesar Rp41,80 triliun, meningkat 20,68% dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar Rp34,64 triliun. Peningkatan tersebut sebagian besar dipengaruhi oleh kenaikan nominal Giro Syariah sebesar 55,59%. Tabungan Syariah dan Deposito Syariah juga mengalami peningkatan masing-masing sebesar 12,26% dan 6,99%.

Dari sisi keuangan, jumlah laba tahun berjalan tahun 2023 adalah sebesar Rp3,50 triliun, mengalami peningkatan sebesar Rp455,92 miliar atau 14,97% dibandingkan dengan



tahun 2022 sebesar Rp3,04 triliun. Total Pendapatan Bunga dan Bagi Hasil tahun 2023 adalah sebesar Rp28,27 triliun, mengalami peningkatan 9,21% dari total Pendapatan Bunga dan Bagi Hasil tahun 2022 sebesar Rp25,89 triliun. Seiring dengan peningkatan pendapatan bunga dan bagi hasil serta peningkatan laba tahun berjalan, total aset Bank BTN pun juga mengalami peningkatan. Total Aset tahun 2023 adalah sebesar Rp438,75 triliun, meningkat 9,10% dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar Rp402,15 triliun. Ekuitas Bank mencapai sebesar Rp30,48 triliun, meningkat 17,64% dari tahun 2022 sebesar Rp25,91 triliun.

Perbandingan Antara Hasil yang Dicapai dengan yang Ditargetkan

Secara umum Bank BTN telah memenuhi harapan para Pemangku Kepentingan. Berbagai target yang telah ditetapkan telah terealisasi di tahun 2023. Aset di tahun 2023 sebesar Rp441,79 triliun, dengan capaian 101,81% di atas target. Pencapaian tersebut disebabkan oleh surat berharga yang dimiliki, kredit/piutang/pembiayaan yang diberikan dan DPK berhasil melampaui target yang ditetapkan. Capaian ekuitas di tahun 2023 sebesar 103,16% dengan realisasi Rp30,48 triliun. Ekuitas yang lebih kuat pada tahun 2023 didukung oleh profitabilitas yang lebih baik sehingga meningkatkan saldo laba pada tahun tersebut.

Realisasi pendapatan bunga di tahun 2023 sebesar Rp28,28 triliun dengan capaian 101,99% di atas target, pencapaian tersebut disebabkan oleh perbaikan kualitas kredit dan strategi Perseroan dalam ekspansi kredit *high yield*. Demikian pula dengan laba operasional di tahun 2023 yang berhasil melampaui target 113,09% dengan realisasi Rp4,54 triliun, pencapaian tersebut disebabkan oleh berhasilnya strategi Perseroan dalam memperbaiki kualitas kredit, ekspansi kredit *high yield* dan optimalisasi pendapatan operasional selain bunga. Sejalan dengan pencapaian laba operasional, laba bersih di tahun 2023 terealisasi sebesar Rp3,50 triliun dengan capaian 114,65% yang berhasil melampaui target yang ditetapkan, pencapaian tersebut disebabkan oleh berhasilnya strategi Perseroan dalam memperbaiki kualitas kredit, ekspansi kredit *high yield* dan optimalisasi pendapatan operasional selain bunga. **Laba di tahun 2023 ini merupakan laba terbesar sepanjang sejarah Perseroan berdiri.**

Dari sisi rasio keuangan, CAR di tahun 2023 sebesar 20,07% dengan capaian 103,24% di atas target, pencapaian tersebut dikontibusi oleh peningkatan laba, penambahan modal inti yang didapat dari *rights issue* dan kemampuan Perseroan dalam mengelola portofolio surat berharga yang dimiliki sehingga tidak memiliki kerugian *month to month* (mtm) yang signifikan. NPL di tahun 2023 sebesar 3,01%, lebih baik dibandingkan target yang sebesar 3,45%. Hal tersebut didorong oleh inisiatif perbaikan

proses bisnis seperti implementasi *Commercial Banking Center* (CBC), *Regional Loan Processing Center* (RLPC) sehingga proses kredit menjadi lebih prudent dan juga *asset sales* yang dilakukan secara periodik. ROA, ROE dan NIM di tahun 2023 masing-masing sebesar 1,07%, 13,86%, dan 3,75% pencapaian tersebut didukung oleh peningkatan laba Perseroan pada tahun 2023, peningkatan pendapatan operasional selain bunga dan efisiensi pada *overhead cost*.

Kendala yang Dihadapi Perseroan

Bisnis Bank BTN akan tetap berfokus pada sektor perumahan dan terkait dengan perumahan, karena sektor perumahan masih tetap menjadi sektor dengan potensi pertumbuhan yang tinggi seiring dengan meningkatnya permintaan dan jumlah *backlog* nasional. Bank BTN juga tetap optimis akan terus dapat mencatatkan kinerja keuangan yang baik seiring dengan adanya beberapa regulasi baru yang terbit di tahun 2023. Dari sektor perumahan, Pemerintah baru melakukan penyesuaian terbaru atas batasan harga rumah subsidi untuk tahun 2023 dan tahun 2024 dengan rata-rata kenaikan sebesar 7% sejak akhir Juni 2023 dan 3% per 1 Januari 2024. Selain itu, Pemerintah baru saja mengeluarkan kebijakan PPN DTP terbaru di sektor properti untuk pembelian rumah dengan harga sampai dengan Rp5 miliar dengan insentif sebesar 100% untuk dasar pengenaan PPN DTP maksimal Rp2 miliar dari harga rumah tersebut sampai dengan Juni 2024 dan 50% untuk periode Juli - Desember 2024.

Terdapat juga Bantuan Biaya Administrasi (BBA) senilai Rp4 juta untuk rumah subsidi dengan maksimal harga Rp350 juta dari November 2023 – Desember 2024. Kebijakan terkait perumahan ini tentunya dapat menstimulus permintaan di sektor properti dan mendorong pertumbuhan kredit Perseroan sebagai bank yang berfokus di sektor tersebut. Selain itu, adanya insentif GWM dan rasio PLM diharapkan dapat memberikan tambahan likuiditas bagi Perseroan, yang nantinya dapat digunakan untuk penyaluran kredit, terutama di sektor perumahan. Selain itu, dengan POJK terbaru (POJK 12/2023) terkait *spin off* UUS, Perseroan akan mengikuti peraturan tersebut dan sedang dalam proses pengkajian terhadap berbagai opsi yang ada.

Merespon ketidakpastian global serta era suku bunga tinggi di sepanjang tahun 2023, Perseroan menghadapi beberapa tantangan dan juga peluang yang membuat Perseroan tetap dapat berkinerja positif.

- a. Hingga September 2023, telah terjadi kenaikan BI7DRRR sebesar 225 bps sejak kenaikan pertama kali pada Agustus 2022 yang memberikan tekanan pada beban bunga Perseroan. Per September 2023, beban bunga tumbuh 44% yoy, namun masih terkendali karena pertumbuhan beban bunga masih lebih rendah dibandingkan kenaikan BI7DRRR yang sebesar 64%.

- b. Selain kenaikan suku bunga acuan, likuiditas perbankan sepanjang tahun 2023 juga cukup ketat, terutama dengan diluncurkannya instrumen Operasi Pasar Terbuka BI yang baru, yaitu Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), SVBI, dan SUVBI. Akibat ketatnya likuiditas, terjadi peningkatan CoF yang menyebabkan penurunan NIM.

Di sisi lain, Perseroan terus berupaya menjawab tantangan tersebut dengan terus mempertahankan kinerja yang kuat dan mengembangkan lini bisnis lainnya:

- Per September 2023, kredit dan pembiayaan kembali tumbuh solid sebesar 9,9% yoy, sejalan dengan *guidance* tahun 2023, dan akan terus ditingkatkan dengan mendorong penyaluran kredit *high yield*.
- Pada September 2023, *Fee Based Income* (FBI) tumbuh 67,3% yoy dengan porsi FBI terhadap total pendapatan yang telah mencapai 10,2%, FBI menjadi sumber pendapatan tambahan bagi Perseroan untuk mengurangi ketergantungan pada aset yang sensitif terhadap suku bunga.
- Efisiensi di sisi operasional juga turut membaik, tercermin dari penurunan biaya operasional sebesar 5,6% yoy hingga September 2023.
- Perseroan juga secara aktif mengelola *cost of fund* melalui rekompensi pendanaan yang sebelumnya sangat bergantung pada deposito komersial dan dialihkan ke dana ritel dan giro-giro operasional.

Hal-Hal Penting yang Diperkirakan Terjadi pada Masa Mendatang dan Prospek Usaha

Pada Januari 2024, World Bank menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia menurun ke level 2,4% untuk tahun 2024. Sementara Bank Indonesia memprakirakan ekonomi dunia melambat menjadi 2,8% pada 2024. Perkembangan tersebut didorong oleh tingkat inflasi di negara maju yang masih berada di atas target dengan tekanan yang mulai mereda. Dengan perkembangan inflasi ini, suku bunga kebijakan moneter termasuk *Federal Funds Rate* (FFR) diperkirakan tetap bertahan tinggi dalam jangka waktu yang lama (*higher for longer*).

Meskipun demikian, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2024 diprediksi akan tetap kuat dan tumbuh positif dalam kisaran 4,8% - 5,2%. Kemudian tingkat inflasi di tahun 2024 diperkirakan akan melandai dibandingkan 2023 pada kisaran target Bank Indonesia yaitu $2,5\% \pm 1\%$ yoy. Untuk mencapai tingkat inflasi tersebut, Pemerintah maupun Bank Indonesia akan melakukan bauran kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil. Sementara, rata-rata nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat (AS) diperkirakan di kisaran Rp15.500 pada akhir tahun 2024, dengan tetap memperhatikan ketidakpastian di pasar keuangan global seperti kebijakan moneter The Fed. Suku bunga

acuan BI tetap dipertahankan pada level 6,00% di akhir tahun 2023 dan kemudian memulai penurunannya pada Semester II 2024. Sektor Jasa keuangan khususnya perbankan diprediksi akan tetap terjaga kinerjanya, kembali normal seperti sebelum pandemi. Diperkirakan pada tahun 2024 Dana Pihak Ketiga (DPK) akan tumbuh pada kisaran 8,0% - 9,0% dan penyaluran kredit perbankan akan tumbuh sebesar 10,0% - 12,0%.

Sektor perumahan masih memiliki ruang untuk tumbuh yang sangat besar mengingat masih tingginya angka *backlog* perumahan nasional dan tingginya jumlah masyarakat yang belum memiliki rumah yang layak. Hingga September 2023, total KPR mencatatkan pertumbuhan positif mencapai 12,66% yoy. Perpanjangan stimulus yang diberikan Pemerintah pada sektor perumahan, akan berdampak pada peningkatan permintaan akan rumah di tahun 2024. Pada akhir November 2023, pemerintah memberikan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk pembelian rumah baru dengan harga hingga Rp5 miliar dan membebaskan PPN 100% untuk rumah dengan nilai jual objek pajak maksimal Rp2 miliar, yang berlaku hingga Juni 2024. Sedangkan untuk periode Juli hingga Desember 2024, Pemerintah akan memberikan diskon PPN sebesar 50%. Insentif PPN DTP ini diperkirakan akan menjadi pendorong utama terhadap permintaan perumahan sepanjang tahun 2024. Selain itu, stimulus juga diberikan oleh Bank Indonesia yaitu pelonggaran rasio LTV/FTV Kredit/Pembiayaan Properti menjadi maksimal 100% untuk semua jenis properti yang berlaku hingga Desember 2024.

Berbagai perkiraan kondisi perekonomian global dan nasional serta industri perbankan tersebut, Perseroan memiliki peluang untuk tumbuh. Peluang yang dimiliki Perseroan antara lain sebagai berikut:

- Sektor Perumahan memiliki potensi yang baik pada tahun depan. Pada tahun 2024, KPR diprediksi tumbuh 9,5% (yoy) yang pertumbuhannya didorong permintaan KPR segmen menengah.
- Relaksasi kebijakan *Loan to Value* (LTV) atau *Financing to Value* (FTV) diperpanjang sampai dengan Desember 2024.
- Akselerasi layanan keuangan digital yang semakin masif, terutama pada *user internet* dan *mobile banking* yang berpotensi meningkatkan CASA dan *fee based income*.

Dengan memanfaatkan keunggulan internal yang dimiliki, maka Perseroan optimis memiliki prospek yang baik di masa mendatang. Sesuai dengan *roadmap Corporate Plan* tahun 2021-2025. *Transformation journey* Bank BTN pada tahun 2024-2025 adalah "*Disrupt and Scale up Through Digital*" yang dijabarkan sebagai berikut:

- Bisnis
 - Funding*, yaitu dengan meningkatkan BTN Solusi dan penawaran program khusus sektor ke lebih banyak sektor serta meningkatkan lebih banyak kasus penggunaan analitik.



- *Lending*, yaitu dengan meluncurkan ekosistem perumahan pelanggan *digital* satu atap, meluncurkan pasar *business* layanan di luar perbankan, meluncurkan pinjaman UMKM yang didukung properti untuk sektor lain (non-perumahan), serta meningkatkan BTN Properti menjadi portal properti *online* terbesar ke 3 di Indonesia.
- *Ecosystem*, yaitu mengembangkan BTN Properti menjadi portal properti *online* terbesar ke 3 di Indonesia.

2. *Enabler*

- Meluncurkan modul pelatihan lanjutan untuk semua peran di seluruh organisasi.
- Meningkatkan *loan origination system* (LOS) dan *dashboard* restrukturisasi.
- Meluncurkan Program Inovasi BTN.

Tata Kelola Perusahaan

Perseroan menyadari bahwa keberlangsungan usaha suatu entitas usaha tidak hanya diukur dari performa keuangan serta peningkatan keuntungan semata, namun juga melalui pengelolaan internal perusahaan di antaranya yaitu pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) yang efektif. Pada dasarnya Perseroan menerapkan prinsip-prinsip GCG dengan tujuan dan keyakinan bahwa hal ini akan menjamin terciptanya keseimbangan bisnis secara menyeluruh sehingga segenap bentuk kepentingan, baik bisnis maupun sosial, individu dengan kelompok, internal juga eksternal, jangka pendek dan jangka panjang serta kepentingan *shareholders* dan *stakeholders* akan menuju pada titik keseimbangan. Penerapan prinsip-prinsip GCG sangat diperlukan, agar Perseroan menjadi lebih tangguh dan mampu bertahan dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat. Perseroan terus berupaya mengikuti perkembangan praktik GCG terbaik di tingkat nasional, regional maupun internasional yang relevan dan tentunya disesuaikan dengan kebutuhan.

Dalam rangka meningkatkan penerapan tata kelola secara berkelanjutan, Perseroan senantiasa menerapkan keempat pilar GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, keberlanjutan dan *ethical behavior*. Keempat pilar tersebut diimplementasikan melalui pemenuhan kepentingan pemegang saham dan memberikan perlakuan yang sama kepada seluruh pemegang saham; keberlanjutan dan daya tahan; melaksanakan pengungkapan dan transparansi; serta dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi.

Dalam pelaksanaan pemenuhan kepentingan pemegang saham, Bank BTN telah memenuhi hak-hak pemegang saham di antaranya membayar dividen secara adil dan tepat waktu. Dasar Kebijakan Pembagian Dividen dilakukan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) atau Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berikut perubahannya. Besarnya dividen Perseroan jumlahnya akan ditentukan pada saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Faktor - faktor yang menjadi pertimbangan dalam penentuan jumlah dan pembayaran dividen di antaranya adalah tingkat kesehatan keuangan, tingkat kecukupan modal, kebutuhan dana untuk ekspansi usaha lebih lanjut, tanpa mengurangi hak dari RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Selain pembagian dividen, Perseroan juga telah memenuhi hak-hak pemegang saham sebagai berikut:

Hak dan Wewenang Istimewa Pemegang Saham Seri A Dwiwarna:

1. Hak untuk menyetujui dalam RUPS.
2. Hak untuk mengusulkan calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris.
3. Hak untuk mengusulkan mata acara RUPS.
4. Hak untuk meminta dan mengakses data dan dokumen Perseroan dengan mekanisme penggunaan hak dimaksud sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.

Hak yang Sama Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan Pemegang Saham Seri B:

1. Hak untuk menghadiri, menyampaikan pendapat, dan memberikan suara dalam RUPS berdasarkan satu saham, memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
2. Hak untuk memperoleh informasi mengenai perusahaan secara tepat waktu, benar, dan teratur, kecuali hal-hal yang bersifat rahasia.
3. Hak untuk menerima bagian dari keuntungan Perusahaan yang diperuntukan bagi Pemegang Saham dalam bentuk dividen dan pembagian keuntungan lainnya, sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki.
4. Hak untuk memperoleh penjelasan lengkap dan informasi yang akurat mengenai prosedur yang harus dipenuhi berkenaan dengan penyelenggaraan RUPS.
5. Dalam hal terdapat lebih dari satu jenis dan klasifikasi saham dalam Perusahaan, maka setiap pemegang saham berhak mengeluarkan suara sesuai dengan jenis, klasifikasi dan jumlah saham yang dimiliki, dan setiap pemegang saham berhak untuk diperlakukan setara berdasarkan jenis dan klasifikasi saham yang dimilikinya.
6. Hak untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan lebih dari 50% dari jumlah nilai kekayaan bersih Perseroan baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain Direksi harus mendapat persetujuan RUPS.
7. Hak untuk mengusulkan mata acara RUPS dengan rincian:
 - a. Pemegang saham Seri A Dwiwarna;
 - b. 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah

Pada tahun 2023, Perseroan telah menyelenggarakan RUPS Tahunan secara tepat waktu. RUPS Tahunan Tahun 2023 dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 2023. RUPS Tahunan telah diselenggarakan dengan baik sesuai dengan agenda yang telah ditetapkan.

Dalam memastikan penerapan keberlanjutan dan daya tahan Perseroan, Bank BTN telah melakukan pengukuran kinerja keberlanjutan dan melaporkannya dalam Laporan Keberlanjutan setiap tahunnya. Perseroan secara ikut berkontribusi terhadap penanganan isu-isu keberlanjutan dan meningkatkan ketahanan perusahaan terhadap risiko keberlanjutan. Perseroan telah mengidentifikasi kelompok pemangku kepentingan utama untuk dilibatkan dalam membahas isu-isu penting yang dihadapi oleh Perseroan. Dengan demikian, Perseroan dapat mengklasifikasi dengan akurat pemangku kepentingan yang paling berkepentingan dengan Perseroan secara timbal balik, bentuk hubungan yang dijalin, topik yang perlu dikomunikasikan, dan upaya yang tepat untuk memaksimalkan karakteristik media komunikasi. Upaya tersebut bertujuan untuk mencapai target lanjutan yang diharapkan Perseroan melalui komunikasi yang efektif.

Perseroan memahami bahwa nasabah memainkan peran yang sangat penting dalam jalannya operasi bisnis perusahaan. Menjaga privasi dan keamanan nasabah merupakan hal yang penting untuk diperhatikan guna membangun kepercayaan nasabah. Perseroan menyimpan data nasabah yang diambil pada saat registrasi. Mengingat bahwa seluruh data tersebut merupakan informasi penting dan mengandung privasi bagi nasabah, data tersebut sudah sepatutnya dijaga dan dilindungi. Seiring dengan kemajuan teknologi, makin sering dan mudah masyarakat mengakses layanan atau aplikasi berbasis data, maka makin besar pula potensi terjadinya kejahatan siber.

Perseroan telah memiliki Kebijakan Khusus tentang Keamanan Teknologi Informasi. Kebijakan ini memastikan bahwa informasi yang dikelola tetap memenuhi prinsip kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan secara efektif dan efisien guna menjamin keberhasilan bisnis Perseroan. Selain itu, kebijakan ini berperan penting dalam rangka menjaga citra Perseroan sebagai bank terpercaya yang mampu melindungi informasi pelanggan serta berdedikasi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan masyarakat.

Perseroan juga melakukan upaya lain untuk melindungi keamanan data nasabah dengan memasang semua perangkat lunak yang telah diotorisasi dan rutin diperbarui secara berkala, memberikan pelatihan keamanan teknologi informasi kepada seluruh pengguna, serta menerapkan manajemen atau standardisasi kata sandi (*password*) untuk memastikan keamanan akses terhadap informasi yang dilindungi. Evaluasi secara berkala juga dilakukan demi menjaga agar arsitektur keamanan data yang dimiliki Perseroan sangat memadai dan efektif dalam melindungi data nasabah.

Perseroan dapat meraih kesuksesan dan keberlanjutan sampai saat ini tentunya tidak terlepas dari keterlibatan dan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, salah satunya adalah sumber daya dari pemasok. Berpedoman pada Kebijakan Khusus Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa, Perseroan menerapkan prinsip menggunakan produksi dalam negeri dengan tetap mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka mendorong pertumbuhan industri dalam negeri. Perseroan mewujudkannya dengan menjalin kerja sama dengan pemasok lokal, yaitu pemasok yang secara geografis berdomisili di dalam negeri. Apabila keperluan barang dan jasa tidak bisa dipenuhi oleh pemasok lokal, atau karena alasan/pertimbangan tertentu, barulah Perseroan akan menggandeng pemasok luar negeri/asing, yaitu mereka yang secara geografis berdomisili di luar Indonesia.

Perseroan berkomitmen dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan dengan mendukung Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) BUMN. Dalam pelaksanaan bisnis perusahaan, Program TJSL sudah menjadi bagian dari pendekatan bisnis perusahaan dengan tujuan memberikan masyarakat luas manfaat secara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Perseroan tidak hanya memaknai substansi program TJSL sebagai upaya membangun hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan dengan lingkungan, komunitas, dan pemangku kepentingan, baik secara lokal, nasional maupun global, tetapi juga sebagai upaya Perseroan untuk melaksanakan misinya dalam memberikan dampak dan kontribusi positif bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan menyelenggarakan Program TJSL, Perseroan memiliki tujuan untuk berkontribusi secara nyata terhadap pembangunan berkelanjutan, memberikan dukungan terhadap keberhasilan bisnis dalam jangka panjang, serta memenuhi harapan pemangku kepentingan terhadap Perseroan. Perseroan mengemban tugas moral untuk mengembangkan bisnis dan memajukan perekonomian dalam negeri yang berkelanjutan dengan senantiasa berpedoman pada nilai integritas, mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menjunjung tinggi etika bisnis.

Perseroan sebagai Lembaga Jasa Keuangan yang peduli lingkungan telah menyesuaikan kebijakan pemberian kredit dengan konsep Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST). Dalam menyalurkan kredit, Perseroan memberikan perhatian khusus terhadap persyaratan lingkungan sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Dengan demikian, Perseroan dapat menghindari kesalahan berupa pemberian kredit kepada pengembang yang dapat memanfaatkannya untuk proyek atau kegiatan yang berdampak negatif terhadap lingkungan. Guna memastikan bahwa kredit yang diberikan tidak digunakan untuk proyek atau kegiatan yang merugikan lingkungan, beberapa praktik penerapannya meliputi memberikan persyaratan lingkungan yang harus dipenuhi, termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Persyaratan ini sangat penting untuk



menghindari kesalahan dalam pengelolaan dana kredit. Selain itu, Perseroan juga menganggap penting adanya kegiatan pengembangan kompetensi bagi pengembang atau mitra kerjanya terkait dengan skema pembiayaan dan potensi dampaknya terhadap lingkungan.

Tidak hanya kredit untuk proyek perumahan, kebijakan pengelolaan risiko keberlanjutan juga dikembangkan untuk penyaluran kredit Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Perseroan melakukan proses Kajian Risiko Sosial dan Lingkungan untuk menilai risiko kredit dari sisi lingkungan dan sosial serta memastikan debitur, baik debitur realisasi baru maupun debitur *consumer* yang sudah ada, tidak memiliki usaha yang berpotensi merusak lingkungan dan menimbulkan konflik sosial.

Selain memenuhi tanggung jawab lingkungan melalui penerapan regulasi, Perseroan juga berupaya menjaga kelestarian lingkungan melalui program dan aktivitas konservasi. Untuk mendukung program ini, Perseroan tidak memiliki kantor operasional yang letaknya di daerah konservasi atau yang memiliki keanekaragaman hayati yang dilindungi.

Terkait hubungan Perseroan dengan Pegawai, Perseroan berkomitmen penuh dalam hal perlindungan hak-hak pegawai. Pemenuhan atas hak-hak pegawai akan meningkatkan kepuasan pegawai yang kemudian secara langsung mendukung performa Perseroan dalam mencapai keberlanjutan. Perseroan secara rutin melakukan perundingan dengan Serikat Pekerja untuk menyusun dan menyepakati Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

Sebagai langkah untuk membina kerja sama, Perseroan selalu berusaha untuk menciptakan komunikasi dua arah dengan para pegawai, termasuk memberikan informasi terkait dengan perubahan struktur organisasi dan penambahan unit bisnis kepada pegawai serta hal-hal yang terkait dengan kepegawaian. Informasi tersebut dapat diakses melalui LAPs, sebuah aplikasi internal yang mengatur tentang ketentuan Perseroan.

Perseroan juga memahami bahwa setiap pegawai berhak atas perlindungan dalam bekerja, yang tertuang dalam Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). Perseroan berupaya semaksimal mungkin untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi pegawai guna mencapai angka kecelakaan kerja nihil (*zero accident*). Lingkungan kerja yang aman dan sehat memengaruhi peningkatan produktivitas dan rasa kepercayaan pegawai terhadap Perseroan, yang kemudian dapat mengantarkan pada keberhasilan perusahaan.

Perseroan telah memberikan rincian kontak melalui situs web Perseroan atau Laporan Tahunan yang mana para pemangku kepentingan dapat menggunakannya untuk menyampaikan keluhan, saran maupun kemungkinan adanya pelanggaran atas hak-hak mereka. Dalam meningkatkan implementasi penerapan GCG di Bank BTN, manajemen Perseroan berkomitmen menjalankan perusahaan secara profesional dengan

berlandaskan pada perilaku yang sesuai dengan kode etik. Oleh karena itu, apabila terdapat pelanggaran terhadap kode etik, manajemen telah menyiapkan media pelaporan yang dikelola secara transparan dan adil melalui sarana *Whistleblowing System*.

Terkait dengan daya tahan Perseroan, Dewan Komisaris sangat menekankan pada efektivitas pelaksanaan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal. Melalui Komite Pemantau Risiko dan Komite Audit, Dewan Komisaris senantiasa memastikan bahwa manajemen risiko dan sistem pengendalian internal berjalan secara efektif.

Perseroan senantiasa menerapkan keterbukaan informasi yang dibutuhkan bagi para pemangku kepentingan. Terkait kepemilikan saham, Perseroan telah mengungkapkan informasi antara lain pemegang saham 5% atau lebih, kepemilikan saham baik yang langsung dan tidak langsung dari pemegang saham utama dan/atau pemegang saham dalam jumlah besar, serta kepemilikan saham Direksi dan Dewan Komisaris baik langsung dan tidak langsung. Perseroan juga melaksanakan pengungkapan informasi melalui laporan tahunan. Laporan tahunan Perseroan telah memuat antara lain, visi, misi, tujuan dan sasaran Perseroan, kinerja keuangan dan non keuangan, kebijakan dividen, detail biografi dari semua Direksi dan Dewan Komisaris, rincian kehadiran masing-masing Direksi dan Dewan Komisaris dalam semua rapat Direksi dan Dewan Komisaris yang diadakan sepanjang tahun, remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris, transaksi pihak terkait, serta kantor Akuntan Publik beserta biaya audit dan non auditnya.

Selain melalui laporan tahunan, Perseroan menyediakan akses informasi dan data baik laporan terkait keuangan dan non keuangan kepada publik secara transparan melalui berbagai media seperti situs web (dalam dua bahasa), media massa (siaran pers), majalah/buletin internal, pertemuan dengan analis, situs resmi BEI, poster dan *banner* produk, aksi korporasi, bahan presentasi Perseroan ke publik dan sebagainya.

Perseroan senantiasa menjalin hubungan yang harmonis dengan pemegang saham, investor potensial, analis maupun masyarakat pasar modal lainnya dengan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan secara berkala seperti pertemuan dengan analis/investor dalam skala nasional maupun internasional serta paparan kinerja kepada publik. Perseroan juga memenuhi kewajiban keterbukaan informasi sebagaimana yang diatur dalam peraturan Pasar Modal seperti Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material, Laporan Keuangan, Laporan tahunan dan Laporan Pemegang Saham Tertentu.

Terkait tanggung jawab Dewan Komisaris, Dewan Komisaris adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris merupakan pihak yang bertugas atau berfungsi melakukan

pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan dan Pemegang Saham khususnya serta pemangku kepentingan pada umumnya. Terkait komposisi Dewan Komisaris, saat ini Perseroan memiliki 50% Komisaris Independen dari jumlah Dewan Komisaris yang ada di Perseroan. Komposisi Komisaris Independen pada posisi tanggal 31 Desember 2023 berjumlah 4 (empat) orang dari 8 (delapan) orang Komposisi Dewan Komisaris.

Dalam rangka meningkatkan peran Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris dibantu oleh 3 (tiga) komite yaitu Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi, serta Komite Pemantau Risiko.

Dalam rangka evaluasi penerapan GCG, Perseroan melaksanakan GCG *Assessment* yang dilaksanakan secara periodik dan konsisten setiap tahun yang terdiri dari *self assessment* maupun *assessment* dari pihak eksternal. Penilaian *self assessment* Tata Kelola dilakukan secara berkala pada posisi akhir bulan Juni dan Desember setiap tahunnya. Untuk tahun 2023, standar penerapan Tata Kelola selain mengacu pada Peraturan OJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum juga mulai mengikuti ketentuan Surat Edaran OJK Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Hasil *self assessment* pada bulan Juni 2023 dan bulan Desember 2023 berada pada peringkat 2 (dua) yang mencerminkan Manajemen Perseroan telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum baik. Dari hasil *assessment* tersebut, Perseroan telah melakukan upaya-upaya perbaikan dengan menindaklanjuti beberapa kelemahan yang direkomendasikan berdasarkan hasil *assessment*.

Selain *self assessment*, pada tahun 2023 Perseroan juga melaksanakan *third party assessment* untuk mendapatkan *second opinion* terhadap kualitas implementasi GCG dalam rangka perbaikan kualitas implementasi GCG secara berkelanjutan. *Assessment* yang dilaksanakan di antaranya adalah survei *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) yang diadakan oleh *Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG) dan Penilaian GCG berdasarkan standar *ASEAN Corporate Governance Scorecard* dilakukan oleh OJK dan *Indonesian Institute for Corporate Directorship* (IICD).

Skor CGPI Perseroan pada tahun 2023 sebesar 90,52 dengan predikat "*Most Trusted*". Perseroan telah melaksanakan tindaklanjut atas rekomendasi hasil *assessment* sebagai berikut:

1. Program pengembangan *Talent* yang dijalankan Bank BTN untuk pemenuhan terhadap kekurangan pegawai pada posisi L1 dan L2.
2. Struktur organisasi Bank BTN sudah sesuai dengan rencana strategi bisnis Bank dan aspirasi Direksi maupun strategi yang telah dituangkan pada *Corporate Plan*, di antaranya telah membentuk Divisi IT Security dan Wholesale Transaction Division.

3. Memperkuat organ pada Kantor Wilayah diantaranya dengan penguatan fungsi control dengan membentuk *Regional Business Control* (RBC) yang membawahi *Branch Business Control* (BBC), *CBC-Business Control* (CBC-BC), dan *Regional Loan Processing Center-Business Control* (RLPC-BC).
4. Perseroan telah memiliki rencana dan strategi yang tercantum dalam Rencana Jangka Panjang (RJP) yang di turunkan ke dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).
5. Pembaruan Kebijakan SOP Sistem Manajemen Kinerja Bank BTN (STORM) dengan menyusun Kebijakan Khusus Rencana Strategis dan *Performance*.
6. Implementasi arsitektur kebijakan baru.
7. Implementasi konsep ESG di seluruh lini bisnis Bank melalui penyusunan *roadmap* dan *framework* ESG BTN 2023-2028.
8. Melakukan kajian implementasi ICoFR lebih lanjut dengan Divisi-divisi terkait.
9. Perseroan telah mengimplementasikan WBS secara independen yaitu pengelolaan WBS dilakukan oleh pihak ketiga.
10. Melakukan *assessment risk maturity* untuk mengetahui tingkat pengelolaan dan pemahaman risiko.

Penilaian Komite di Bawah Direksi

Perseroan membentuk dan menetapkan struktur serta keanggotaan Komite-Komite di bawah Direksi dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas Direksi. Komite-Komite tersebut berperan dalam mempermudah *monitoring* dan menciptakan efektivitas pemecahan masalah serta pengembangan aspek yang dipandang strategis oleh Perseroan sesuai peraturan yang berlaku. Komite-Komite tersebut meliputi:

1. Komite Manajemen Risiko
2. *Asset and Liability Management Committee* (ALCO)
3. Komite Kebijakan Perkreditan
4. Komite Kredit
5. Komite *Human Capital*
6. Komite Pengarah Teknologi Informasi (TI)
7. Komite Pengarah Transformasi
8. Komite Bisnis
9. Komite *Environmental, Social and Governance* (ESG)

Untuk mengukur efektivitas kinerja komite di bawah Direksi dalam membantu Direksi menjalankan pengurusan perusahaan maka dilakukan penilaian terhadap Komite di bawah Direksi. Prosedur penilaian kinerja komite di bawah Direksi dilakukan oleh Direksi secara periodik dengan kriteria penilaian atas kinerja Komite di bawah Direksi yaitu pemenuhan pelaksanaan rapat serta kehadiran dalam rapat selama tahun buku. Selama tahun 2023, Direksi menilai bahwa komite-komite di bawah Direksi telah menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik.



Perubahan Komposisi Anggota Direksi

Selama tahun 2023, telah terjadi perubahan komposisi Direksi. Perubahan komposisi Direksi dilakukan berdasarkan kebutuhan Perseroan. Perubahan komposisi Direksi adalah sebagai berikut:

KOMPOSISI DIREKSI PERIODE 1 JANUARI 2023 – 10 JANUARI 2023

Komposisi Direksi periode 1 Januari 2023 sampai dengan 10 Januari 2023 berjumlah 9 (Sembilan) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama, 1 (satu) orang Wakil Direktur Utama dan 7 (tujuh) orang Direktur sebagai berikut.

Haru Koesmahargyo	: Direktur Utama
Nixon L. P. Napitupulu	: Wakil Direktur Utama
Hirwandi Gafar	: Direktur Consumer
Nofry Rony Poetra	: Direktur Finance
Eko Waluyo	: Direktur Human Capital, Compliance and Legal
Elisabeth Novie Riswanti	: Direktur Assets Management
Andi Nirwoto	: Direktur IT and Digital
Jasmin	: Direktur Distribution and Funding
Setiyo Wibowo	: Direktur Risk Management

KOMPOSISI DIREKSI PERIODE 11 JANUARI 2023 – 15 MARET 2023

Pada tanggal 11 Januari 2023, RUPS Luar Biasa memutuskan untuk memberhentikan dengan hormat serta mengangkat kembali Andi Nirwoto sebagai Direktur IT and Digital. Sehingga komposisi Direksi periode 11 Januari 2023 sampai dengan 15 Maret 2023 berjumlah 9 (sembilan) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama, 1 (satu) orang Wakil Direktur Utama dan 7 (tujuh) orang Direktur sebagai berikut.

Haru Koesmahargyo	: Direktur Utama
Nixon L. P. Napitupulu	: Wakil Direktur Utama
Hirwandi Gafar	: Direktur Consumer
Nofry Rony Poetra	: Direktur Finance
Eko Waluyo	: Direktur Human Capital, Compliance and Legal
Elisabeth Novie Riswanti	: Direktur Assets Management
Andi Nirwoto	: Direktur IT and Digital
Jasmin	: Direktur Distribution and Funding
Setiyo Wibowo	: Direktur Risk Management

KOMPOSISI DIREKSI PERIODE 16 MARET 2023 – 31 DESEMBER 2023

Pada tanggal 16 Maret 2023, RUPS Tahunan 2023 memutuskan:

1. Memberhentikan dengan hormat Haru Koesmahargyo sebagai Direktur Utama Perseroan.
2. Mengalihkan penugasan Nixon L. P. Napitupulu yang semula sebagai Wakil Direktur Utama menjadi Direktur Utama Perseroan.
3. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:
 - a. Oni Febriarto Rahardjo - sebagai Wakil Direktur Utama;
 - b. Hakim Putratama - sebagai Direktur Institutional Banking

Sehingga komposisi Direksi periode 16 Maret 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 berjumlah 10 (sepuluh) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama, 1 (satu) orang Wakil Direktur Utama dan 8 (delapan) orang Direktur sebagai berikut.

Nixon L. P. Napitupulu	: Direktur Utama
Oni Febriarto Rahardjo	: Wakil Direktur Utama
Hirwandi Gafar	: Direktur Consumer
Nofry Rony Poetra	: Direktur Finance
Eko Waluyo	: Direktur Human Capital, Compliance and Legal
Elisabeth Novie Riswanti	: Direktur Assets Management
Andi Nirwoto	: Direktur IT and Digital
Jasmin	: Direktur Distribution and Funding
Setiyo Wibowo	: Direktur Risk Management
Hakim Putratama	: Direktur Institutional Banking

Penutup

Direksi memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kepercayaan, komitmen dan kerja sama dari seluruh pemangku kepentingan, khususnya kepada jajaran tim manajemen dan seluruh pegawai yang telah bekerja keras dan mampu memperoleh kinerja yang baik di tahun 2023. Direksi memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas arahan yang diberikan oleh Dewan Komisaris yang sangat memberikan kontribusi dalam pencapaian kinerja Perseroan. Direksi juga mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pemegang saham, nasabah dan mitra kerja Perseroan.

Perseroan akan berusaha secara terus menerus meningkatkan kualitas layanan sehingga dapat memenuhi harapan *stakeholders*. Keberhasilan Perseroan dalam memberikan kinerja yang baik hingga saat ini, tidak terlepas dari dukungan dan kepercayaan dari seluruh *stakeholders*. Oleh sebab itu, Direksi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dan kepercayaan tersebut.

Ke depannya, sebagai *Agent of Development* pemerintah, Perseroan dapat menjalankan fungsi sebagai lembaga intermediasi yang terdepan dan terpercaya, melakukan literasi dan inklusi keuangan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Jakarta, Februari 2024

Atas Nama Direksi



Nixon L.P. Napitupulu

Direktur Utama



DIREKSI

1. **Hakim Putratama**: Direktur Institutional Banking, 2. **Andi Nirwoto**: Direktur IT and Digital,
3. **Setiyo Wibowo**: Direktur Risk Management, 4. **Jasmin**: Direktur Distribution and Funding,
5. **Nixon L. P. Napitupulu**: Direktur Utama,



1

2

3

4

5

6. **Oni Febriarto Rahardjo**: Wakil Direktur Utama, 7. **Elisabeth Novie Riswanti**: Direktur Assets Management, 8. **Eko Waluyo**: Direktur Human Capital, Compliance and Legal, 9. **Hirwandi Gafar**: Direktur Consumer, 10. **Nofry Rony Poetra**: Direktur Finance,





LAPORAN DEWAN KOMISARIS



Chandra M. Hamzah
Komisaris Utama/Independen

“

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya, atas implementasi visi Perseroan yaitu Menjadi *The Best Mortgage Bank in Southeast Asia* pada tahun 2025, pada tahun 2023 Perseroan dapat mencatatkan kinerja yang baik. Perseroan tetap tumbuh dan terus bertransformasi di tengah kondisi perekonomian yang belum sepenuhnya membaik.

Pemegang Saham dan para Pemangku Kepentingan yang terhormat,

Berikut kami sampaikan laporan pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Komisaris terhadap jalannya kepengurusan Perseroan untuk tahun buku 2023. Dalam laporan ini, akan disampaikan penilaian atas kinerja Direksi selama tahun 2023, pandangan atas prospek usaha yang disusun oleh Direksi, penerapan tata kelola perusahaan yang baik, penilaian atas Komite di bawah Dewan Komisaris dan perubahan komposisi Dewan Komisaris.

Penilaian Kinerja Direksi

Dewan Komisaris senantiasa menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi. Sebelum menyampaikan pandangan Dewan Komisaris atas pencapaian kinerja Direksi, Dewan Komisaris akan menyampaikan frekuensi dan cara pemberian nasihat kepada Direksi serta pengawasan Dewan Komisaris terhadap perumusan dan implementasi strategi.

Frekuensi dan Cara Pemberian Nasihat Kepada Direksi

Dewan Komisaris senantiasa menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi. Komunikasi yang intensif selalu dilaksanakan untuk membahas isu-isu signifikan, termasuk konsistensi pelaksanaan rencana bisnis tahun 2023. Pemberian nasihat dari Dewan Komisaris kepada Direksi dilakukan secara formal maupun informal.

Pemberian nasihat dari Dewan Komisaris kepada Direksi dilakukan melalui pelaksanaan rapat Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris dengan Direksi, tanggapan, arahan, dan/atau pandangan Dewan Komisaris melalui surat tertulis, rapat Komite di bawah Dewan Komisaris dan kunjungan kerja Dewan Komisaris. Kami menilai rapat Dewan Komisaris secara internal dan rapat bersama Direksi menjadi salah satu bentuk pengawasan paling efektif. Sepanjang tahun 2023, Dewan Komisaris telah melaksanakan 52 (lima puluh dua) kali Rapat Dewan Komisaris secara internal dan 12 (dua belas) kali rapat bersama, yang terdiri atas 6 (enam) kali Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi serta 6 (enam) kali Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris.

Pengawasan Terhadap Perumusan dan Implementasi Strategi

Dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat, Dewan Komisaris terlibat aktif dalam penyusunan strategi Perseroan dan pengawasan terhadap implementasinya. Pengawasan terhadap perumusan strategi Perseroan dilaksanakan dengan melakukan pengawasan terhadap

penyusunan (RBB) dan Corporate Plan 2021-2025 serta memberikan persetujuan Rencana Bisnis. Implementasi strategi di Perseroan harus sejalan dengan visi Perseroan yaitu, Menjadi *The Best Mortgage Bank in Southeast Asia* pada tahun 2025. Untuk itu, Perseroan harus mempertimbangkan beberapa aspek di antaranya ROI, sales dan volume khususnya terkait dengan mortgage. Kemudian, Dewan Komisaris juga menekankan pada aspek penerapan *Governance, Risk dan Compliance (GRC)* pada Perseroan. Pengawasan Dewan Komisaris terhadap penerapan tata kelola Perseroan dalam rangka mencapai visi Perseroan tersebut telah berjalan sesuai dengan strategi yang telah disusun oleh Direksi.

Pengawasan terhadap implementasi strategi dilaksanakan melalui Rapat bersama Direksi yang dilaksanakan 1 (satu) bulan sekali. Selain itu, Dewan Komisaris juga melakukan pengawasan kepada manajemen Perseroan untuk memastikan arahan Dewan Komisaris telah sampai ke seluruh Pegawai. Dalam pengawasan tersebut, Dewan Komisaris berfokus pada *risk appetite* dan *risk tolerance* serta upaya manajemen dalam pelaksanaan strategi tersebut telah sesuai dengan penerapan GCG. Dewan Komisaris juga mempertimbangkan beberapa aspek inisiatif dari Direksi yang sifatnya strategis lainnya, dan Dewan Komisaris juga menekankan bahwa proses dari implementasi tersebut harus tetap berada dalam penerapan tata kelola yang baik.

Dewan Komisaris telah melakukan tugas pengawasan, mengarahkan, memberikan saran, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Perseroan antara lain:

1. Reviu Kinerja Perseroan secara *Bankwide* dan UUS secara berkala.
2. *Monitoring* pelaksanaan inisiatif strategis rencana perusahaan secara berkala.
3. *Monitoring* pelaksanaan manajemen risiko secara berkala termasuk profil risiko, Tingkat kesehatan Bank, KPMM, *risk appetite*, *risk tolerance*, dan *recovery plan*.
4. Persetujuan penyusunan dan perubahan Rencana Bisnis dan Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan.
5. Pengawasan Dewan Komisaris atas Kinerja dan Pelaksanaan Rencana Bisnis Bank.
6. Penyesuaian Rencana Bisnis Bank dan Rencana Kerja & Anggaran Perseroan.
7. Pengembangan Organisasi Perseroan dan strategi pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM).
8. Kebijakan strategis lainnya.

Pandangan Atas Kinerja Direksi

Dalam memberikan penilaian atas kinerja Direksi, Dewan Komisaris mempertimbangkan beberapa aspek sebagai dasar penilaiannya. Aspek tersebut antara lain, kondisi perekonomian,



capaian kinerja yaitu kinerja operasional, kinerja keuangan dan tingkat kesehatan perusahaan. Penilaian atas kinerja Direksi dapat disampaikan sebagai berikut.

Pada tahun 2023, kondisi ekonomi global sedikit tertahan. Hingga Desember 2023, The Fed telah menaikkan suku bunga acuannya menjadi 5,50% atau mencapai 525 bps sejak Februari 2022. Kenaikan *Federal Funds Rate* (FFR) yang agresif ini diperkirakan akan tetap tinggi dengan siklus yang lebih panjang mendorong tetap kuatnya mata uang dolar Amerika Serikat (AS) sehingga memberikan tekanan pelemahan nilai tukar di berbagai negara. Tekanan pelemahan nilai tukar tersebut semakin meningkat sejalan dengan tingginya ketidakpastian pasar keuangan global. Aliran keluar investasi portofolio asing menambah tekanan nilai tukar di negara berkembang, termasuk Indonesia. Pada Januari 2024, World Bank menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2023 menjadi 2,6% dan sedikit menurun ke level 2,4% untuk tahun 2024. Kondisi tersebut didorong oleh tingkat inflasi di negara maju yang masih berada di atas target dengan tekanan yang mulai mereda. Dengan perkembangan inflasi ini, suku bunga kebijakan moneter termasuk FFR diperkirakan tetap bertahan tinggi dalam jangka waktu yang lama (*higher for longer*).

Meskipun perekonomian global masih melambat, pertumbuhan ekonomi nasional masih melanjutkan tren positifnya pada Triwulan IV 2023. Secara keseluruhan, Pemerintah memperkirakan ekonomi Indonesia akan tumbuh sebesar 4,8%-5,2% yoy pada akhir tahun 2023 didukung oleh beberapa insentif kebijakan di akhir tahun untuk mendukung konsumsi rumah tangga. Tingkat inflasi baik umum maupun inti tetap terkendali dengan adanya koordinasi Bank Indonesia, Pemerintah Pusat dan Daerah yang menyebabkan tingkat inflasi tetap terjaga pada level $3,0\% \pm 1,0\%$ pada akhir tahun 2023. Sementara itu, nilai tukar Rupiah masih dipengaruhi oleh dinamika yang terjadi pasar global sehingga tekanan terhadap Rupiah masih berlanjut dan kurs Rupiah terhadap Dollar AS berada di level 15.399 pada akhir tahun 2023.

Dari sisi perbankan, Otoritas Jasa Keuangan mencatat Kinerja sektor jasa keuangan khususnya perbankan pada 2023 masih solid dengan indikator permodalan dan likuiditas yang tersedia serta risiko kredit yang terjaga. Fungsi intermediasi perbankan pada bulan November 2023 kembali mencatatkan tren peningkatan dengan kredit tumbuh sebesar 9,74% yoy. Pertumbuhan ini terutama ditopang oleh kredit modal kerja yang tumbuh 10,14% yoy. Adapun secara bulanan, pertumbuhan nominal kredit perbankan naik sebesar Rp63 triliun menjadi Rp6.966 triliun. Sementara itu, Dana Pihak Ketiga (DPK) pada November 2023 tercatat tumbuh sebesar 3,04% yoy menjadi Rp8.216 triliun, dengan laju pertumbuhan meningkat, terutama didorong oleh peningkatan deposito sebesar 3,50% yoy. Risiko kredit melanjutkan penurunan dengan rasio NPL perbankan sebesar 2,36%. Di sisi lain, kredit restrukturisasi Covid-19 kembali mencatatkan penurunan sebesar Rp15,84 triliun menjadi Rp285,32 triliun, dengan jumlah nasabah juga menurun menjadi 1,14 juta nasabah setelah pada Oktober 2023 tercatat sebesar 1,22 juta nasabah.

Di tengah kondisi perekonomian tersebut, Direksi mampu menghadapi tantangan dan peluang yang terjadi dengan mencatatkan kinerja yang baik di tahun 2023. Nilai penyaluran realisasi baru untuk produk Kredit dan Pembiayaan Konsumer tahun 2023 sebesar Rp50,94 triliun, meningkat 4,90% dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar Rp48,56 triliun. Jumlah posisi Dana Pihak Ketiga (DPK) Ritel/Konsumer tahun 2023 sebesar Rp72,51 triliun, meningkat 2,82% dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar Rp70,52 triliun. Nilai penyaluran realisasi baru untuk produk Kredit dan Pembiayaan Komersial/Korporasi tahun 2023 sebesar Rp45,10 triliun, meningkat 15,33% dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar Rp39,11 triliun. Jumlah posisi Dana Pihak Ketiga (DPK) Lembaga/Komersial tahun 2023 sebesar Rp277,42 triliun, meningkat 10,35% dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar Rp251,41 triliun.

Dari sisi syariah, nilai penyaluran realisasi baru untuk Pembiayaan Syariah tahun 2023 sebesar Rp10,63 triliun, meningkat 29,36% dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar Rp8,21 triliun. Jumlah posisi Dana Pihak Ketiga (DPK) Syariah tahun 2023 adalah sebesar Rp41,80 triliun, meningkat 20,68% dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar Rp34,64 triliun. Peningkatan DPK tersebut sebagian besar dipengaruhi oleh kenaikan nominal Giro Syariah sebesar 55,59%. Tabungan Syariah dan Deposito Syariah juga mengalami peningkatan masing-masing sebesar 12,26% dan 6,99%.

Selain kinerja operasional dan keuangan, tingkat kesehatan bank juga menjadi salah satu pertimbangan Dewan Komisaris dalam melakukan penilaian atas kinerja Direksi. Tingkat kesehatan bank mencerminkan hasil penilaian kondisi perseroan yang dilakukan terhadap risiko dan kinerja bank yang dapat dilihat dari peringkat akhir hasil penilaian berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 04/POJK.03/2016 Tanggal 26 Januari 2017 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum beserta perubahannya dan Surat Edaran OJK No. 14/SEOJK.03/2017 Tanggal 17 Maret 2017 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Dengan Menggunakan Pendekatan Risiko (*Risk - Based Bank Rating*) yang mencakup 4 (empat) faktor yaitu Profil Risiko, Tata Kelola, Rentabilitas (*Earnings*) dan Permodalan (*Capital*).

Peringkat kesehatan bank posisi Desember 2023 (*Self Assessment*) berada pada peringkat komposit 2 (dua)/PK2 yang mencerminkan kondisi bank yang secara umum sehat sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.

Pandangan atas Prospek Usaha yang Disusun Direksi

Pada Januari 2024, Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan ekonomi dunia melambat menjadi 2,8%. Perkembangan tersebut didorong oleh tingkat inflasi di negara maju yang masih berada di atas target dengan tekanan yang mulai mereda. Meskipun demikian, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2024 diprediksi akan tetap kuat dan tumbuh positif dalam kisaran 4,8% - 5,2%. Kemudian tingkat inflasi di tahun 2024 diperkirakan akan melandai dibandingkan 2023 pada kisaran target Bank Indonesia yaitu $2,5\% \pm 1\%$ yoy.

Di tahun 2024, daya beli masyarakat diperkirakan akan meningkat seiring perbaikan ekonomi nasional dan penyelenggaraan Pemilu. Harga jual rumah juga diperkirakan akan meningkat secara merata didukung oleh perkembangan infrastruktur, perbaikan ekonomi nasional, serta sentimen positif terhadap keberhasilan penyelenggaraan Pemilu. Hal ini juga didukung oleh hasil riset House Price Index (HPI) Perseroan pada Triwulan III - 2023, pertumbuhan harga rumah masih terus menguat sebesar 8,66% yoy. Pertumbuhan HPI ini didukung oleh pertumbuhan di semua tipe rumah yaitu rumah tipe kecil (21 m^2 - 36 m^2), rumah tipe menengah (37 m^2 - 45 m^2) dan tipe besar (46 m^2 - 70 m^2).

Setelah mempertimbangkan kondisi perekonomian, Dewan Komisaris berpendapat bahwa prospek usaha yang telah disusun oleh Direksi sudah tepat. Dewan Komisaris berkeyakinan bahwa Perseroan akan dapat memanfaatkan peluang yang ada di antaranya adalah sektor perumahan memiliki potensi yang baik pada tahun depan, relaksasi kebijakan *Loan to Value* (LTV) atau *Financing to Value* (FTV) diperpanjang sampai dengan Desember 2024, serta akselerasi layanan keuangan *digital* yang semakin masif, terutama pada user internet dan mobile banking yang berpotensi meningkatkan *CASA* dan *fee based income*.

Pandangan Atas Penerapan Tata Kelola Bank

Perseroan senantiasa memperkuat komitmen untuk menerapkan dan menegakkan prinsip-prinsip GCG secara konsisten di setiap kegiatan usaha sehari-hari, mematuhi setiap peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku, dan selalu terbuka dalam hal perbaikan sesuai dengan *best practice* agar sesuai dengan tujuan, visi, dan misi Perseroan serta menciptakan nilai tambah Perseroan bagi Pemegang Saham serta pemangku kepentingan lainnya.

Penerapan tata kelola perusahaan yang baik merupakan salah satu indikator penting bagi pemegang saham untuk menilai kinerja Perseroan dan meyakini bahwa Perseroan telah dikelola dengan baik serta diyakini mampu untuk melindungi kepentingan seluruh pemegang saham. Perseroan berkomitmen untuk terus meningkatkan penerapan tata kelola perusahaan yang baik dalam rangka memahami harapan dari setiap pemegang saham.

Dewan Komisaris senantiasa menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan bahwa kepengurusan Perseroan yang dilaksanakan oleh Direksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan memberikan nasihat/pendapat yang dibutuhkan atas setiap tindakan/kegiatan strategis dalam rangka mencapai tujuan Perseroan. Penerapan GCG di Perseroan telah berjalan dengan baik. Hal ini dapat terlihat pada komponen-komponen sebagai berikut.

Manajemen Risiko

Dalam rangka pelaksanaan manajemen risiko dan sebagai tindak lanjut penerapan Basel II khususnya pilar 1, Perseroan telah mengimplementasikan:

1. Pengukuran Risiko Kredit dengan melakukan pemetaan eksposur risiko kredit sesuai kategori portofolio dalam perhitungan ATMR Risiko Kredit menggunakan *Standardized Approach* mengacu pada SEOJK No. 11/SEOJK.03/2018 tentang Perubahan atas SEOJK No. 42/SEOJK.03/2016 mengenai Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar. Saat ini, Bank telah menerapkan perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Kredit sesuai SEOJK No 24/SEOJK.03/2021 tanggal 7 Oktober 2021 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan menggunakan Pendekatan Standar Bagi Bank Umum sesuai ketentuan regulator yang berlaku.
2. Penggunaan *Standardized Model* untuk risiko pasar sesuai dengan SEOJK No. 38/SEOJK.03/2016 tanggal 8 September 2016 perihal Pedoman Penggunaan Metode Standar dalam Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dengan Memperhitungkan Risiko Pasar dan saat ini Bank telah melakukan persiapan SEOJK No. 23/SEOJK.03/2022 tanggal 7 Desember 2022 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Pasar Bagi Bank Umum yang akan diterapkan mulai 1 Januari 2024 dengan melakukan uji coba perhitungan dan melaporkan kepada OJK untuk ATMR Pasar posisi bulan Juni 2023, September 2023 dan Desember 2023.
3. Perhitungan kebutuhan modal minimum dengan menggunakan perhitungan ATMR Risiko Operasional Pendekatan Standar dengan mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor No. 06/SEOJK.03/2020 tanggal 29 April 2020 dan saat ini Bank melakukan pencatatan data kerugian terkait risiko operasional sesuai dengan ketentuan Regulator.

Saat ini, Perseroan telah memiliki *Risk Appetite Statement* (RAS) yang merupakan pernyataan kualitatif serta ukuran kuantitatif dari risiko-risiko utama Perseroan. Pengungkapan RAS dilakukan secara tertulis dan didokumentasikan dengan baik oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko. Penetapan limit RAS dilakukan oleh Dewan Komisaris dan Direksi. Dalam penetapan RAS, telah memperhatikan keberlanjutan ekonomi, lingkungan dan sosial yang kemudian diselaraskan pada penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), *Risk Appetite*, *Risk Tolerance* dan *Recovery Plan*.



Dalam Sistem manajemen risiko, Perseroan melaksanakan proses manajemen risiko yang didukung dengan 4 (empat) pilar penerapan manajemen risiko, yaitu:

1. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi.
2. Kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penerapan limit risiko.
3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta Sistem Informasi.
4. Sistem Pengendalian Risiko yang menyuruh.

Dalam melakukan tugas pengawasan aktif, Dewan Komisaris dibantu oleh komite-komite yang disebut sebagai organ pendukung Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan Regulator. Selanjutnya, hasil pengawasan Dewan Komisaris disampaikan kepada Direksi untuk diteruskan kepada *layer* di bawahnya, yaitu satuan Kerja Manajemen Risiko, Satuan Kerja Kepatuhan, Satuan Kerja Audit Internal dan Satuan Kerja Policy and Procedure.

Sistem Pengendalian internal yang dilakukan oleh Perseroan dinilai sudah berjalan efektif dan memadai tercermin dari efektivitas pelaksanaan fungsi-fungsi pengendalian internal, antara lain fungsi internal audit, manajemen risiko, kepatuhan, finansial dan operasional kontrol. Tata kelola risiko Perseroan yang berlandaskan Tata Kelola Perusahaan yang baik dan terlibatnya seluruh organ Perseroan dalam pengelolaan manajemen risiko. Hal ini dapat dilihat dari susunan organisasi manajemen risiko Perseroan. Dewan Komisaris melalui rapat Komite Pemantau Risiko dan Direksi melalui rapat Komite Manajemen Risiko bertanggung jawab untuk memastikan penerapan Manajemen Risiko telah memadai sesuai dengan karakteristik, kompleksitas dan profil risiko Perseroan secara periodik. Berdasarkan hasil penelaahan yang telah dilakukan pada tahun 2023, Direksi dan Dewan Komisaris menilai bahwa sistem manajemen risiko telah dilaksanakan secara memadai.

Dewan Komisaris dan Direksi berperan aktif pada proses manajemen risiko dalam rangka memitigasi risiko Perseroan antara lain melalui pemantauan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko, meliputi tata kelola risiko, kerangka manajemen risiko, proses manajemen risiko, kecukupan sistem informasi manajemen dan SDM serta kecukupan sistem pengendalian internal.

Sistem Pengendalian Internal

Implementasi sistem pengendalian intern dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan kinerja Perseroan, meningkatkan nilai bagi *stakeholder*, meminimalisir risiko kerugian dan menjaga kepatuhan pada ketentuan dan peraturan penundang-undangan yang berlaku. Perseroan menerapkan sistem pengendalian intern sebagai komponen pengawasan yang penting dalam pengelolaan Perseroan dan menjadi acuan kegiatan operasional yang sehat dan terkendali. Perseroan mengacu pada *Committee of the Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) - Internal Control Integrated Framework* dalam menyusun kerangka kerja pengendalian intern guna memastikan kecukupan pengendalian operasional

maupun finansial, pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasional, serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Tujuan pengendalian internal menurut COSO meliputi tujuan operasional, tujuan pelaporan dan tujuan kepatuhan.

Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk memastikan bahwa Direksi telah memantau efektivitas pelaksanaan sistem pengendalian intern, sehingga Dewan Komisaris memiliki peran aktif untuk memastikan adanya perbaikan terhadap permasalahan Perseroan yang dapat mengurangi efektivitas sistem pengendalian intern. Direksi bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan dan strategi serta prosedur pengendalian intern. Direksi juga bertanggung jawab untuk memantau kecukupan dan efektivitas dari sistem pengendalian intern. Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab dalam meningkatkan etika kerja dan integritas yang tinggi serta menciptakan budaya organisasi yang menekankan pada seluruh pegawai Perseroan mengenai pentingnya pengendalian intern yang berlaku di Perseroan.

Selanjutnya proses pengawasan oleh manajemen dan budaya pengendalian yang terlaksana dengan baik mendorong terciptanya Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*) yang mencerminkan keseluruhan komitmen, perilaku, kepedulian, serta langkah Dewan Komisaris dan Direksi dalam melaksanakan kegiatan pengendalian operasional Perseroan. Unsur-unsur Lingkungan Pengendalian tersebut meliputi:

1. Struktur organisasi yang memadai;
2. Gaya kepemimpinan dan filosofi Manajemen Perseroan;
3. Integritas dan nilai-nilai etika serta kompetensi seluruh pegawai;
4. Kebijakan dan prosedur sumber daya manusia Perseroan;
5. Atensi dan arahan Manajemen Bank dan Komite lainnya, seperti Komite Manajemen Risiko; dan
6. Faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi operasional Perseroan dan penerapan manajemen risiko.

Perseroan melalui Internal Audit Division (IAD) melakukan *Internal Control Assessment (ICA)* secara periodik dalam rangka evaluasi atas efektivitas sistem pengendalian internal. Penilaian tersebut mengukur kualitas pengendalian intern dari satuan kerja auditee atas 5 (lima) komponen pengendalian intern COSO *Framework* menggunakan kriteria dan metodologi rating kuesioner *Internal Control Assessment (ICA)* serta *professional judgement* auditor melalui pengujian langsung (*walkthrough*) di lapangan. Pada tahun 2023, Perseroan telah menjalankan pengendalian intern sesuai dengan prinsip-prinsip pengendalian dan secara keseluruhan kualitas sistem pengendalian intern telah berjalan dengan baik.

Secara garis besar, langkah-langkah yang dilakukan Perseroan dalam rangka memastikan terselenggaranya kegiatan pemantauan yang efektif, antara lain:

1. Memastikan bahwa fungsi pemantauan telah ditetapkan secara jelas dan terstruktur dengan baik dalam organisasi Perseroan.

2. Menetapkan satuan kerja atau pegawai yang ditugaskan untuk memantau efektivitas pengendalian intern.
3. Menetapkan frekuensi yang tepat untuk kegiatan pemantauan yang didasarkan pada risiko yang melekat pada Perseroan dan sifat atau frekuensi perubahan yang terjadi dalam kegiatan operasional.
4. Mengintegrasikan Sistem Pengendalian Internal ke dalam kegiatan operasional dan menyediakan laporan rutin seperti jurnal pembukuan, *management review* dan laporan mengenai persetujuan atas eksepsi atau penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur yang ditetapkan (*justifikasi atas irregularities*) yang selanjutnya dilakukan kaji ulang.
5. Melakukan kaji ulang terhadap dokumentasi dan hasil evaluasi dari satuan kerja atau pegawai yang ditugaskan untuk melakukan pemantauan.
6. Menetapkan informasi atau umpan balik (*feedback*) dalam suatu format dan frekuensi yang tepat.

Selain itu, Perseroan juga melaksanakan Audit atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Pengendalian Internal (PSA 62) untuk memastikan kepatuhan Perseroan terhadap pasal-pasal hukum, peraturan dan perjanjian kerja sama serta kepatuhan pengendalian internal yang mencakup lingkungan pengendalian, Identifikasi Risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan. Evaluasi atas efektivitas sistem pengendalian internal (*risk control*) Perseroan dilakukan pada seluruh unit Kantor Pusat (divisi/desk/Regional Office) serta Kantor Cabang baik Konvensional maupun Syariah. Segala sesuatu terkait dengan permasalahan kecukupan pengendalian intern telah dilaporkan langsung kepada Direksi melalui Direktur Utama serta kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit. Upaya tindak lanjut telah dilakukan untuk meminimalkan risiko dan mengatasi permasalahan yang muncul.

Direksi dan Dewan Komisaris berkomitmen untuk memastikan bahwa Tata Kelola Perusahaan dijalankan dengan baik sebagai dasar pencapaian tujuan untuk menjaga dan meningkatkan nilai Perusahaan. Salah satu implementasi Tata Kelola Perusahaan yang baik adalah memastikan bahwa sistem pengendalian intern telah dilaksanakan secara memadai.

Direksi dan Dewan Komisaris atau Komite Audit melakukan evaluasi atas efektivitas sistem pengendalian internal Bank yang mencakup lima komponen utama pengendalian, yaitu Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*) termasuk di dalamnya Pengawasan oleh Manajemen dan Budaya Pengendalian (*Management Oversight and Control Culture*), Identifikasi dan Penilaian Risiko (*Risk Recognition and Assessment*), Kegiatan Pengendalian dan Pemisahan Fungsi (*Control Activities and Segregation of Duties*), Sistem Akuntansi, Informasi, dan Komunikasi (*Accountancy, Information and Communication*), Kegiatan Pemantauan dan Tindakan Koreksi Penyimpangan (*Monitoring Activities and Correction Deficiencies*). Berdasarkan hasil penelaahan yang telah dilakukan pada tahun 2023, Direksi dan Dewan Komisaris menilai sistem pengendalian intern telah dilaksanakan secara memadai.

Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern ini merupakan pedoman yang memuat ukuran minimal tentang Sistem Pengendalian Intern yang wajib diselenggarakan dan diterapkan oleh Perseroan di dalam seluruh aspek-aspek yang berkaitan dengan penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan operasional Bank, sehingga tercipta kesamaan pemahaman dan landasan mengenai tingkat pemeliharaan kepentingan dan komitmen dari semua pihak yang terkait dengan Perseroan.

Whistleblowing System

Kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran atau *Whistleblowing System* (WBS) Perseroan berpedoman pada Peraturan Menteri BUMN No.PER-2/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 39/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang Penerapan Strategi *Anti Fraud* Bagi Bank Umum, serta Petunjuk Teknis No. PT.7-B.2 tanggal 31 Oktober 2023 tentang Pengelolaan *Whistleblowing System*. WBS Perseroan merupakan bagian dari sistem pengendalian internal dan penerapan strategi anti fraud dalam mencegah terjadinya praktik penyimpangan dan bertujuan untuk mendeteksi dini dan mencegah terjadinya penyimpangan ataupun pelanggaran serta secara bertahap menciptakan iklim kerja yang terbuka, tulus, jujur dan bertanggung jawab di Perseroan.

Mekanisme penyampaian laporan pelanggaran melalui WBS dilakukan dengan membuat laporan pengaduan/pengungkapan dan mengirimkannya berdasarkan indikasi pelanggaran tersebut dilakukan oleh siapa. Perseroan memiliki komitmen untuk memberikan perlindungan kepada setiap pelapor. Perlindungan kepada Pelapor diberikan untuk mendukung keberanian Pelapor dalam melaporkan dugaan pelanggaran dan/atau jika terdapat tindakan balasan dari Terlapor. Terhadap Pelapor (*Whistleblower*) yang menyampaikan laporan WBS yang diakui tingkat akurasi dan beritikad baik, Perseroan dapat memberikan jaminan perlindungan.

WBS Perseroan dikelola oleh Pengelola WBS Independen dari pihak eksternal (Deloitte). Perseroan juga telah bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia terkait dengan penanganan WBS dalam upaya pemberantasan korupsi. Kerja sama tersebut bertujuan membangun dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi penanganan pengaduan baik secara internal maupun eksternal yang terintegrasi secara profesional, transparan, akuntabel dengan mengutamakan kerahasiaan dalam rangka optimalisasi pemberantasan tindak pidana korupsi.

Perseroan memiliki komitmen untuk memberikan perlindungan kepada setiap pelapor. Perlindungan kepada Pelapor diberikan untuk mendukung keberanian Pelapor dalam melaporkan dugaan pelanggaran dan/atau jika terdapat tindakan balasan dari Terlapor. Terhadap Pelapor (*Whistleblower*) yang menyampaikan laporan WBS yang diakui tingkat akurasi dan beritikad baik, Perseroan dapat memberikan jaminan



perlindungan Terkait dengan pelaksanaan WBS, Dewan Komisaris berperan melakukan evaluasi apabila pelanggaran dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris dan Komite di bawah Dewan Komisaris. Pengelola WBS Independen akan menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris. Selanjutnya, Dewan Komisaris akan melakukan validasi dan memutuskan layak atau tidaknya dilakukan audit khusus yang investigasi lanjutan/pendalaman akan dilakukan oleh Tim Audit Khusus (IAD)/Tim Auditor Eksternal. Jika tidak layak untuk dilakukan audit khusus maka penanganan akan disesuaikan dengan ketentuan Perseroan.

Perseroan melakukan internalisasi WBS dengan pendistribusian pedoman Penerapan Kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) yang ditetapkan berdasarkan Surat Edaran Direksi serta presentasi *sharing session* secara langsung kepada seluruh pimpinan dan pegawai Perseroan. Selain itu, guna menjangkau seluruh *stakeholders* Perseroan, sosialisasi *Whistleblowing System* juga dilakukan melalui *website* Perseroan dan berbagai media, seperti buletin internal, poster, *standing banner*, *customer gathering*, presentasi langsung pedoman etika dan kebijakan WBS.

Dewan Komisaris berpandangan bahwa pengelolaan *Whistleblowing System* di Perseroan telah berjalan dengan baik. Hal ini dilihat dari pengelolaan laporan pengaduan serta tindak lanjut dari pengaduan tersebut. Pengaduan yang masuk selama tahun 2023 berjumlah 106 (seratus enam) pengaduan yang terdiri dari 30 (tiga puluh) pengaduan melalui SMS/Telepon/Whatsapp, dan 76 (tujuh puluh enam) pengaduan melalui Email/Website. Berdasarkan jumlah pengaduan yang masuk, 79 (tujuh puluh sembilan) pengaduan tidak terbukti, 6 (enam) pengaduan masih dalam proses pengumpulan informasi/tindak lanjut, dan sisanya 21 (dua puluh satu) pengaduan telah selesai diproses dan/atau telah diberikan sanksi.

Sustainability Governance

Dengan menerapkan paradigma GCG secara menyeluruh, akan terjadi keselarasan kepentingan dan tujuan antara Perseroan dengan para pemangku kepentingan dan selanjutnya akan mendorong terciptanya keberlanjutan perusahaan dalam jangka panjang. Perseroan berkomitmen memperkuat bisnis berkelanjutan di seluruh lini bisnis perusahaan. Perseroan meyakini, usaha yang dijalankan dengan menyeimbangkan aspek 3P (*Profit, People, Planet*) akan menciptakan nilai-nilai keberlanjutan serta menjadikan Perseroan sebagai perusahaan yang mampu menjaga keberlanjutan bisnis hingga masa mendatang.

Sesuai dengan bidang usaha Perseroan, Perseroan berkomitmen menjalankan usaha dengan memperkuat bisnis berkelanjutan berbasis ekosistem perumahan. Perseroan menyadari, keterlibatan Perseroan dalam lingkungan pengembangan

perumahan, sangat menentukan keberhasilan atau kesuksesan program tersebut. Oleh karena itu, Perseroan berusaha maksimal mendukung program Pemerintah dalam penyaluran pembiayaan perumahan untuk membantu masyarakat memiliki rumah dengan kualitas terbaik.

Perseroan memperkuat landasan keberlanjutan dengan menanamkan komitmen kebijakan untuk mewujudkan bisnis yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Dalam mendukung kinerja Keuangan Keberlanjutan, Perseroan menerbitkan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) yang mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. Perseroan menyadari pentingnya pengembangan sistem Keuangan Berkelanjutan yang stabil serta inklusif. Tujuan Perseroan menerbitkan RAKB adalah sebagai salah satu sarana sosialisasi dan upaya internalisasi nilai keberlanjutan kepada para pemangku kepentingan, serta untuk mendukung pencapaian kinerja Perseroan yang berorientasi pada tujuan pembangunan berkelanjutan.

Penilaian Kinerja Komite-Komite di Bawah Dewan Komisaris

Dewan Komisaris dibantu oleh 3 (tiga) komite yaitu Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi, serta Komite Pemantau Risiko. Dewan Komisaris secara berkala melakukan penilaian atas efektivitas kinerja Komite-komite di bawah Dewan Komisaris. Penilaian dimaksud didasarkan pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara nomor PER-3/MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan OJK No. 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. Kriteria penilaian Komite di bawah yaitu *Key Performance Indicator* yang telah ditetapkan untuk masing-masing Komite di bawah Dewan Komisaris dengan metode penilaian sendiri (*self assessment*) dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara. Dewan Komisaris menilai bahwa selama tahun 2023 Komite-komite telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan cukup efektif.

Perubahan Komposisi Dewan Komisaris

Selama tahun 2023, telah terjadi perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris. Perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan kebutuhan Perseroan. Perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS PERIODE 1 JANUARI 2023 – 10 JANUARI 2023

Komposisi Dewan Komisaris periode 1 Januari 2023 sampai dengan 10 Januari 2023 sebanyak 8 (delapan) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama/Independen, 1 (satu) orang Wakil Komisaris Utama/Independen, 3 (tiga) orang Komisaris Independen dan 3 (tiga) orang Komisaris sebagai berikut:

Chandra M. Hamzah	: Komisaris Utama/Independen
Iqbal Latanro	: Wakil Komisaris Utama/Independen
Armand B. Arief	: Komisaris Independen
Ahdi Jumhari Luddin	: Komisaris Independen
Sentot A. Sentausa	: Komisaris Independen
Andin Hadiyanto	: Komisaris
Herry Trisaputra Zuna	: Komisaris
Himawan Arief Sugoto	: Komisaris

KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS PERIODE 11 JANUARI 2023 – 11 AGUSTUS 2023

Berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Tahun 2023, Mohamad Yusuf Permana diangkat menjadi Komisaris Perseroan. Sehingga komposisi Dewan Komisaris periode 11 Januari 2023 sampai dengan 11 Agustus 2023 sebanyak 9 (sembilan) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama/Independen, 1 (satu) orang Wakil Komisaris Utama/Independen, 3 (tiga) orang Komisaris Independen dan 4 (empat) orang Komisaris sebagai berikut:

Chandra M. Hamzah	: Komisaris Utama/Independen
Iqbal Latanro	: Wakil Komisaris Utama/Independen
Armand B. Arief	: Komisaris Independen
Ahdi Jumhari Luddin	: Komisaris Independen
Sentot A. Sentausa	: Komisaris Independen
Andin Hadiyanto	: Komisaris
Herry Trisaputra Zuna	: Komisaris
Himawan Arief Sugoto	: Komisaris
Mohamad Yusuf Permana	: Komisaris

KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS PERIODE 12 AGUSTUS 2023 – 31 DESEMBER 2023

Pada tanggal 12 Agustus 2023, Ahdi Jumhari Luddin sebagai Komisaris Independen Perseroan meninggal dunia sehingga demikian masa jabatan Yang Bersangkutan berakhir dengan sendirinya. Komposisi Dewan Komisaris periode 12 Agustus 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebanyak 8 (delapan) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama/Independen, 1 (satu) orang Wakil Komisaris Utama/Independen, 2 (dua) orang Komisaris Independen dan 4 (empat) orang Komisaris sebagai berikut:

Chandra M. Hamzah	: Komisaris Utama/Independen
Iqbal Latanro	: Wakil Komisaris Utama/Independen
Armand B. Arief	: Komisaris Independen
Sentot A. Sentausa	: Komisaris Independen
Andin Hadiyanto	: Komisaris
Herry Trisaputra Zuna	: Komisaris
Himawan Arief Sugoto	: Komisaris
Mohamad Yusuf Permana	: Komisaris

Penutup

Kepada pemegang saham, Dewan Komisaris mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan. Dewan Komisaris menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Direksi yang telah mampu menjalankan kepengurusan Perseroan dan menghasilkan kinerja yang baik di tahun 2023. Dewan Komisaris juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh karyawan Perseroan yang telah memberikan kontribusinya secara optimal. Dewan Komisaris sungguh berharap, ke depannya seluruh jajaran Perseroan dapat terus merumuskan strategi yang tepat dan mampu membawa Perseroan menuju pertumbuhan yang lebih baik.

Jakarta, Februari 2024

Atas Nama Dewan Komisaris



Chandra M. Hamzah
Komisaris Utama/Independen



DEWAN KOMISARIS

1. **Himawan Arief Sugoto**: Komisaris, 2. **Sentot A. Sentausa**: Komisaris Independen, 3. **Mohamad Yusuf Permana**: Komisaris
4. **Chandra M. Hamzah**: Komisaris Utama/Independen

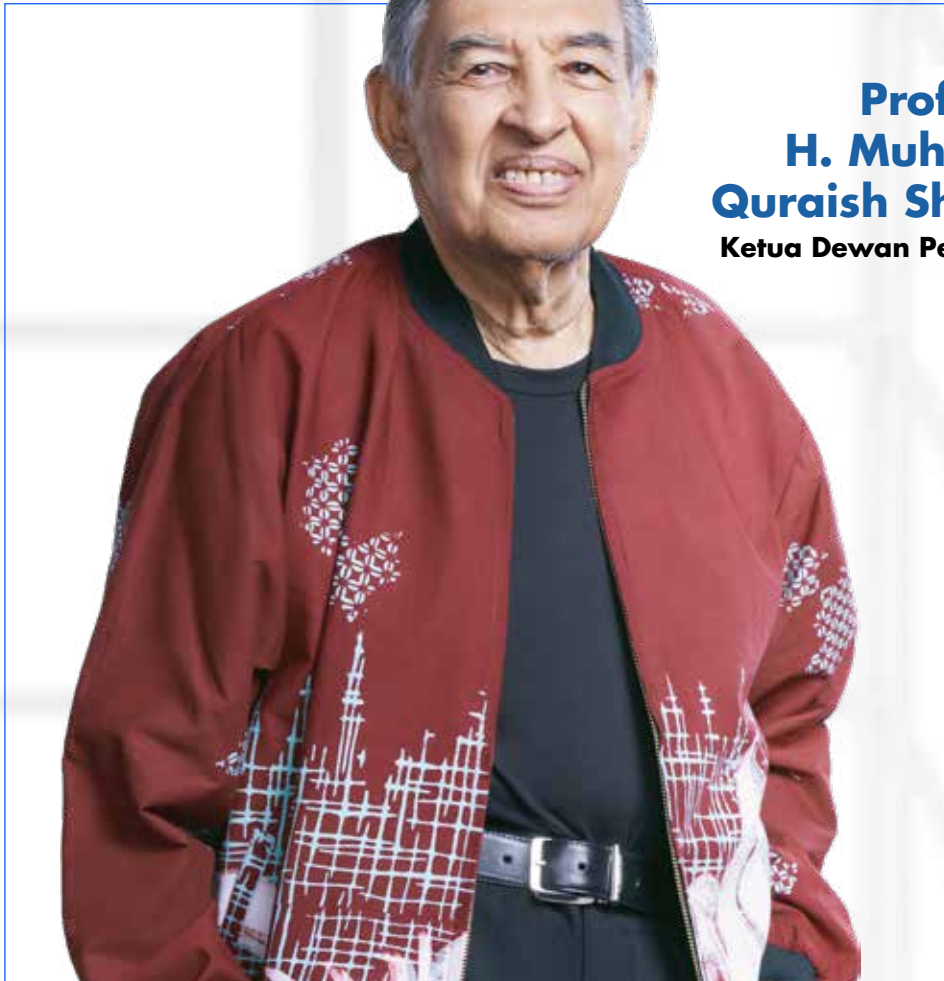


5. **Iqbal Latanro**: Wakil Komisaris Utama/Independen, 6. **Armand B. Arief**: Komisaris Independen,
7. **Herry Trisaputra Zuna**: Komisaris, 8. **Andin Hadiyanto**: Komisaris





LAPORAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH



**Prof. Dr.
H. Muhammad
Quraish Shihab, M.A.**
Ketua Dewan Pengawas Syariah

“

Perkenalkan, saya mewakili Dewan Pengawas Syariah menyampaikan laporan pelaksanaan pengawasan terhadap kegiatan Perseroan selama tahun 2023.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Para Pemangku Kepentingan dan Pemegang Saham yang Terhormat,

Untuk menjaga agar Lembaga Keuangan Syariah (LKS) pada tataran implementasinya tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syaria'ah, maka dalam menjalankan aktivitasnya, Perseroan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan usahanya agar sesuai dengan prinsip Syariah (Pasal 1 angka 14 POJK No. 12 tahun 2023 Tentang Unit Usaha Syariah).

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

DPS memiliki tugas dan tanggung jawab memberikan nasihat dan saran kepada Direktur UUS serta mengawasi kegiatan UUS agar sesuai dengan prinsip syariah. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS meliputi antara lain:

1. Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk terkait syariah yang dikeluarkan Perseroan.
2. Mengawasi proses pengembangan produk baru Perseroan yang terkait Syariah agar sesuai dengan fatwa DSN-MUI.
3. Memberikan opini syariah terhadap produk baru dan/atau pembiayaan yang direstrukturisasi yang terkait syariah dengan mengacu antara lain pada fatwa DSN-MUI dan ketentuan yang mengatur mengenai pelaksanaan prinsip syariah dan kegiatan usaha UUS.
4. Meminta fatwa kepada DSN-MUI untuk produk baru Perseroan terkait syariah yang belum ada fatwanya.
5. Melakukan *review* secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Perseroan.
6. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja Perseroan yang menjalankan dan/atau terkait aktivitas syariah dalam rangka pelaksanaan tugasnya.
7. DPS wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (GCG).
8. Melakukan pengawasan terhadap pengembangan produk baru Perseroan terkait syariah:
 - a. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat Perseroan yang berwenang mengenai tujuan, karakteristik dan akan yang digunakan dalam produk baru terkait syariah yang akan dikeluarkan.
 - b. Memastikan ketersediaan akan yang digunakan dalam produk baru terkait syariah dalam fatwa DSN-MUI:
 - 1) Dalam hal telah terdapat fatwa, maka DPS melakukan kajian atas kesesuaian akad produk baru dengan fatwa DSN-MUI.
 - 2) Dalam hal belum terdapat fatwa, maka DPS mengusulkan kepada Direksi Perseroan untuk melengkapi akad produk baru terkait syariah dengan fatwa dari DSN-MUI.
 - c. Melakukan *review* sistem dan prosedur dari produk baru yang akan dikeluarkan terkait dengan pemenuhan prinsip syariah.
 - d. Memberikan pendapat syariah atas produk baru yang akan dikeluarkan Perseroan.
 - e. Melakukan evaluasi pemenuhan prinsip syariah atas kebijakan dan prosedur untuk mengelola risiko yang melekat pada produk dan/atau aktivitas baru Perseroan.
9. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan UUS:
 - a. Melakukan analisa laporan yang disampaikan oleh dan/atau yang diminta dari Direksi, pelaksanaan fungsi audit intern dan/atau fungsi kepatuhan untuk mengetahui kualitas pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah atas kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dan serta pelayanan jasa Perseroan.
 - b. Menetapkan jumlah uji petik (sampel) transaksi yang akan diperiksa dengan memperhatikan kualitas pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah dari masing-masing kegiatan.
 - c. Memeriksa dokumen transaksi yang diuji petik (sampel) untuk mengetahui pemenuhan prinsip syariah sebagaimana dipersyaratkan dalam kebijakan internal, antara lain:
 - Ketersediaan dokumen bukti pembelian barang, untuk akad murabahah sebagai bukti terpenuhinya syarat jual beli murabahah.
 - Ketersediaan dokumen laporan usaha nasabah, untuk akad mudharabah/musarakah, sebagai dasar melakukan perhitungan distribusi bagi hasil.
 - d. Melakukan inspeksi, pemeriksaan, permintaan keterangan dan/atau konfirmasi kepada pegawai UUS dan/atau nasabah untuk memperkuat hasil pemeriksaan dokumen, apabila diperlukan.
 - e. Melakukan *review* terhadap kebijakan internal terkait aspek syariah apabila terdapat indikasi ketidaksesuaian pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah atas kegiatan dimaksud.
 - f. Memberikan pendapat syariah atas kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa UUS.
 - g. Melaporkan hasil pengawasan DPS kepada OJK menggunakan format yang ditetapkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode semester berakhir.
 - h. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
10. Manajemen Risiko Perseroan:
 - a. Melakukan evaluasi (*review*) atas kebijakan manajemen risiko UUS yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.
 - b. Melakukan evaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah paling kurang secara triwulanan.

Pelaksanaan Kegiatan Dewan Pengawas Syariah Tahun 2023

Pada tahun 2023, Dewan Pengawas Syariah telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:



1. Pelaksanaan Rapat

Rapat DPS adalah forum musyawarah antara DPS untuk membahas setiap kebijakan dan keputusan strategis maupun operasional dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan, memberikan nasihat, dan memberikan saran kepada Direksi dan Manajemen Unit Usaha Syariah (UUS) dalam bidang syariah agar sesuai dengan prinsip syariah. Sepanjang Tahun 2023, DPS telah melaksanakan 13 (tiga belas) kali rapat DPS.

2. Frekuensi dan Cara Pemberian Nasihat dan Saran Serta Pengawasan Pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal Terhadap Emiten atau Perusahaan Publik

Sepanjang tahun 2023, DPS telah mengeluarkan sebanyak 32 (tiga puluh dua) Opini Dewan Pengawas Syariah. Opini DPS ini dikeluarkan sebagai respon atas perkembangan bisnis UUS Bank BTN agar tetap berjalan sesuai dengan Prinsip Syariah.

3. Laporan Hasil Pengawasan dan Rekomendasi DPS

Pada periode tahun 2023, DPS telah melakukan pelaporan atas Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah untuk Semester II Tahun 2023 dan Semester I Tahun 2023 secara tepat waktu.

Perubahan Komposisi Dewan Pengawas Syariah

Selama tahun 2023, telah terjadi perubahan komposisi anggota Dewan Pengawas Syariah. Perubahan komposisi anggota Dewan Pengawas Syariah dilakukan berdasarkan kebutuhan Perseroan.

KOMPOSISI DEWAN PENGAWAS SYARIAH PERIODE 1 JANUARI 2023 – 15 MARET 2023

Komposisi Dewan Pengawas Syariah periode 1 Januari 2023 sampai dengan 15 Maret 2023 sebanyak 3 (tiga) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua Dewan Pengawas Syariah dan 2 (dua) orang Anggota Dewan Pengawas Syariah sebagai berikut:

Prof. Dr. H. Muhammad Quraish Shihab, MA : Ketua
Dr. H. Mohamad Hidayat, MBA, MH : Anggota
Mohammad Bagus Teguh Perwira, Lc, MA : Anggota

KOMPOSISI DEWAN PENGAWAS SYARIAH PERIODE 16 MARET 2023 – 17 OKTOBER 2023

Pada tanggal 16 Maret 2023, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan menyetujui dan mengesahkan pemberhentian Prof. Dr. H. Muhammad Quraish Shihab dari Ketua Umum DPS dan Dr. H. Mohamad Hidayat, MBA, MH dari anggota DPS. Kemudian, RUPS menyetujui dan mengesahkan pengangkatan kembali Muhammad Quraish Shihab sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk periode kedua. Sehingga komposisi Dewan Pengawas Syariah periode 16 Maret 2023 sampai dengan 17 Oktober 2023 sebanyak 2 (dua) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua Dewan Pengawas Syariah dan 1 (satu) orang Anggota Dewan Pengawas Syariah sebagai berikut:

Prof. Dr. H. Muhammad Quraish Shihab, MA : Ketua
Mohammad Bagus Teguh Perwira, Lc, MA : Anggota

KOMPOSISI DEWAN PENGAWAS SYARIAH PERIODE 18 OKTOBER 2023 – 31 DESEMBER 2023

Pada tanggal 18 Oktober 2023, Muhammad Faiz, Lc, MA diangkat sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah. Sehingga komposisi Dewan Pengawas Syariah periode 18 Oktober 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebanyak 3 (tiga) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua Dewan Pengawas Syariah dan 2 (dua) orang Anggota Dewan Pengawas Syariah sebagai berikut:

Penutup

Demikian Laporan Dewan Pengawas Syariah untuk tahun 2023. Ke depannya, Dewan Pengawas Syariah senantiasa berkomitmen dalam memastikan ketaatan pada prinsip-prinsip syariah serta kepatuhan atas peraturan perundang-undangan dengan senantiasa mengingatkan kepada jajaran Manajemen Perseroan. Dengan demikian Perseroan dapat mencapai kinerja yang lebih baik.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Jakarta, Februari 2024

Atas Nama Dewan Pengawas Syariah

Prof. Dr. H. Muhammad Quraish Shihab, MA
Ketua Dewan Pengawas Syariah

DEWAN PENGAWAS SYARIAH

1. **Muhammad Faiz, Lc, MA:** Anggota,
2. **Prof. Dr. H. Muhammad Quraish Shihab, MA:** Ketua,
3. **Mohammad Bagus Teguh Perwira, Lc, MA:** Anggota

**1****2****3**

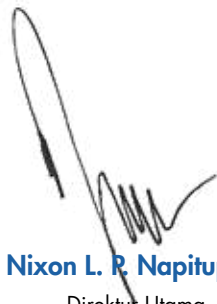


Tanggung Jawab Pelaporan Tahunan —

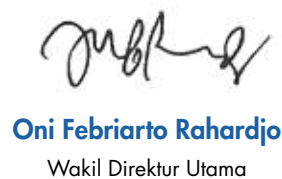
Surat Pernyataan Anggota Direksi Tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2023 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk tahun 2023 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan Perseroan. Kami juga menyatakan bahwa Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Internal Perseroan sudah cukup memadai. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

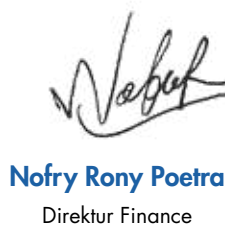
Jakarta, 13 Februari 2024



Nixon L. R. Napitupulu
Direktur Utama



Oni Febriarto Rahardjo
Wakil Direktur Utama



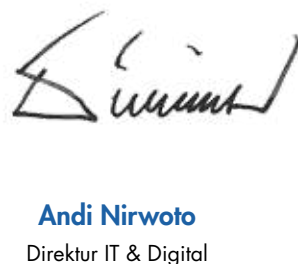
Nofry Rony Poetra
Direktur Finance



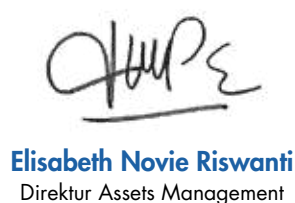
Eko Waluyo
Direktur Human Capital,
Compliance, & Legal



Setiyo Wibowo
Direktur Risk Management



Andi Nirwoto
Direktur IT & Digital



Elisabeth Novie Riswanti
Direktur Assets Management



Jasmin
Direktur Distribution & Funding



Hirwandi Gafar
Direktur Consumer



Hakim Putratama
Direktur Institutional Banking

Surat Pernyataan Anggota Dewan Komisaris Tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2023 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk tahun 2023 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan Perseroan. Kami juga menyatakan bahwa Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Internal Perseroan sudah cukup memadai. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 13 Februari 2024



Chandra M. Hamzah

Komisaris Utama/Independen



Iqbal Latanro

Wakil Komisaris Utama/Independen



Armand B. Arief

Komisaris Independen



Sentot A. Sentausa

Komisaris Independen



Andin Hadiyanto

Komisaris



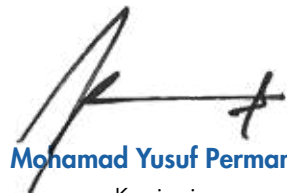
Herry Trisaputra Zuna

Komisaris



Himawan Arief Sugoto

Komisaris



Mohamad Yusuf Permana

Komisaris



PROFIL PERUSAHAAN



PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (“Perseroan”) diawali dengan berdirinya *Postspaarbank* pada tahun 1897. Saat ini, Perseroan telah memiliki 631 jaringan Kantor Konvensional serta 109 jaringan Kantor Syariah.



Identitas Perusahaan —



Nama Perusahaan



PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Nama Panggilan



Bank BTN (Perseroan)

Kode Saham



BBTN

Tanggal Pendirian



9 Februari 1950

Pencatatan di Bursa Saham



17 Desember 2009, Bursa Efek Indonesia

Bidang Usaha



Bank Umum, termasuk melakukan kegiatan Bank berdasarkan prinsip syariah

Status Perseroan



Perseroan Terbatas (PT)/Perusahaan Terbuka/
Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Jumlah Pegawai



12.045 Orang
Per 31 Desember 2023

Dasar Hukum Pendirian



- Undang-Undang Darurat No. 9 Tahun 1950 Tanggal 9 Februari 1950 tentang Perubahan Undang-undang *Postspaarbank* (*Staatbald* 1934 No. 653, 1937 No. 176 dan 197 dan 1941 No. 295) (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 12 Tahun 1950).
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 4 Tahun 1963 Tanggal 22 Juni 1963 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang No. 36 Tahun 1953 tentang Bank Tabungan Negara (Lembaran Negara No. 86 Tahun 1953).
- Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1992 Tanggal 29 April 1992 tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Tabungan Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).
- Akta pendirian Bank sebagai Persero No. 136 Tanggal 31 Juli 1992 dibuat di hadapan Notaris Muhani Salim, S.H., di Jakarta.

Akses Informasi



Menara Bank BTN
 Jl. Gajah Mada No. 1 Jakarta 10130, Indonesia
 ☎ (021) 6336789
 📠 (021) 6346704
 @ csd@btn.co.id
 🌐 www.btn.co.id
 Call Center : 1500-286

Kontak Perusahaan



Sekretaris Perusahaan
Ramon Armando

Menara BTN
 Jl. Gajah Mada No.1, Jakarta Pusat 10130
 ☎ (021) 6336789 ext. 2003
 📠 (021) 6336719
 @ csd@btn.co.id

Investor Relations

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
 Menara BTN Lantai 16
 Jalan Gajah Mada No. 1 Jakarta Pusat 10130
 ☎ +62 21 63870107
 @ investor_relations@btn.co.id

Layanan Informasi Publik

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
 🌐 ppid.btn.co.id



Modal Dasar

Rp10.239.216.000.000



Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

Rp7.017.222.206.500

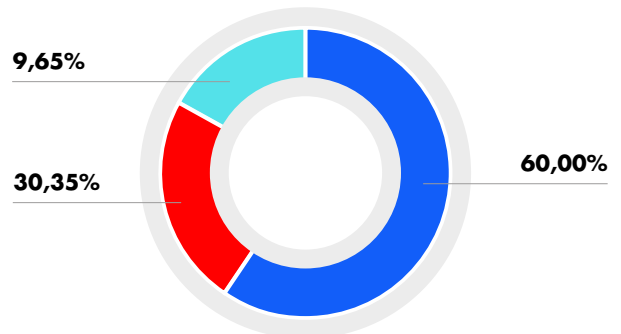


Data Jaringan Usaha

- Jaringan Perbankan Konvensional: 6 Kantor Wilayah, 81 Kantor Cabang, 541 Kantor Cabang Pembantu (KCP), dan 3 Kantor Fungsional.
- Jaringan Perbankan Syariah: 34 Kantor Cabang Syariah dan 75 Kantor Cabang Pembantu Syariah.



Kepemilikan



Keterangan / Description

- Pemerintah Republik Indonesia
- Publik Domestik
- Publik Asing



Media Sosial

f Bank BTN @bankbtn
 X @bankbtn Bank BTN



Nama dan Alamat Kantor Wilayah, Kantor Cabang Konvensional dan Kantor Cabang Syariah —

Kantor Wilayah

KANTOR WILAYAH 1

Kantor Wilayah Jawa Barat
Jl. Jend. Sudirman No. 19, Bekasi 17143
Telp : (021) 88953281
Email : kantorwilayah1@btn.co.id
Web : www.btn.co.id

KANTOR WILAYAH 3

Kantor Wilayah Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara
Gedung Graha Sudirman
Jl. Panglima Sudirman No. 7-9, Kel. Gembong Asin, Kec. Genteng,
Surabaya
Telp : (031) 5661704, 5661204
Email : kantorwilayah3@btn.co.id
Web : www.btn.co.id

KANTOR WILAYAH 5

Kantor Wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua
Jl. Sultan Hasanuddin No. 1, Makassar
Telp : (0411) 5070760
Email : kantorwilayah5@btn.co.id
Web : www.btn.co.id

KANTOR WILAYAH 2

Kantor Wilayah DKI Jakarta dan Banten
Gedung Yodya Tower Lt. 3
Jl. Mayjen DI Panjaitan Kav 8, RT 003 RW 011,
Kel. Cipinang Cempedak Kec. Jatinegara, Jakarta Timur
Telp : (021) 2301184, 31901656, 3905775
Email : kantorwilayah2@btn.co.id
Web : www.btn.co.id

KANTOR WILAYAH 4

Kantor Wilayah Sumatera
Gedung Graha Merah Putih Lt. 8,
Jl. Puteri Hijau No. 1, Kesawan, Medan 20111
Telp: (061) 80011133
Email: kantorwilayah4@btn.co.id
Web: www.btn.co.id

KANTOR WILAYAH 6

Kantor Wilayah Jawa Tengah dan DIY
Jl. M.T. Haryono No. 717, Semarang 50242
Telp : (024) 8455932, 8455934
Email : kantorwilayah6@btn.co.id
Web : www.btn.co.id

Kantor Cabang Konvensional

Kantor Cabang Konvensional Wilayah 1 (Kantor Wilayah Jawa Barat)

Kantor Cabang Bandung

Jl. Jawa No. 7, Bandung 40117
Telp : (022) 4232112, 4241036
Email : kc.bandung@btn.co.id
Web : www.btn.co.id

Kantor Cabang Cibinong

Ruko Cibinong City Centre Blok B20-21 &
D20-21 Jl. Tegar Beriman Kel. Pakansari Kec.
Cibinong, Kab. Bogor
Telp : (021) 83721442
Email : kc.cibinong@btn.co.id
Web : www.btn.co.id

Kantor Cabang Harapan Indah Bekasi

Ruko Office Park Harapan Indah
Blok OP Kavling No. OP1-01 & OP1-02
Harapan Indah, Bekasi 17132
Telp : (021) 88386971(hunting),
88386972, 88386973
Email : kc.harapanindah@btn.co.id
Web : www.btn.co.id

Kantor Cabang Bandung Timur

Jl. Raya Cinunuk No. 223 A
Kec. Cileunyi, Kab. Bandung
Telp : (022) 7816883
Email : kc.bandungtimur@btn.co.id
Web : www.btn.co.id

Kantor Cabang Bekasi

Jl. Jend. Sudirman No. 19, Bekasi 17143
Telp : (021) 8840649
Email : kc.bekasi@btn.co.id
Web : www.btn.co.id

Kantor Cabang Cikarang

Pertokoan Cikarang Central City Blok B No 2,
3, 5, 6, Jl. Raya Cikarang - Cibusah,
Kab. Bekasi 17530
Telp : (021) 22180090/ 22180096
Email : kc.cikarang@btn.co.id
Web : www.btn.co.id

Kantor Cabang Bogor

Jl. Pengadilan No. 13-15,
Bogor 16121
Telp : (0251) 8311700
Email : kc.bogor@btn.co.id
Web : www.btn.co.id

Kantor Cabang Cibubur

Gedung A (Utama)
Jl. Transyogi Km. 3, Ruko Madison Blok C1
No. 1-3, Komplek Cibubur Times Square,
Jatikarya, Jatisampurna, Kota. Bekasi 17435
Telp : (021) 84300071, 84300073
Email : kc.cibubur@btn.co.id
Web : www.btn.co.id

Kantor Cabang Depok

Jl. Margonda Raya No. 186,
Depok 16423
Telp : (021) 7751236, 7751237
Email : kc.depok@btn.co.id
Web : www.btn.co.id

Kantor Cabang Konvensional

Kantor Cabang Konvensional Wilayah 1 (Kantor Wilayah Jawa Barat)

Kantor Cabang Cirebon

Jl. Siliwangi No. 20A-20B, Cirebon 45121
 Telp : (0231) 209143, 209153
 Email : kc.cirebon@btn.co.id
 Web : www.btn.co.id

Kantor Cabang Karawang

Jl. Galuh Mas Raya Blok VI-A No. 6, Desa. Sukaharja, Kec. Teluk Jembe, Timur, Kab. Karawang
 Telp : (0267) 8411400, 8411500
 Email : kc.karawang@btn.co.id
 Web : www.btn.co.id

Kantor Cabang Purwakarta

Jl. RE. Martadinata No. 1, Purwakarta 41114
 Telp : (0264) 201024, 210830, 210831, 206637
 Email : kc.purwakarta@btn.co.id
 Web : www.btn.co.id

Kantor Cabang Tasikmalaya

Jl. Sutisna Senjaya No. 101, Tasikmalaya 46112
 Telp : (0265) 334464, 334465
 Email : kc.tasikmalaya@btn.co.id
 Web : www.btn.co.id

Kantor Cabang Sukabumi

Jl. Jendral Sudirman No. 49, Kel. Sriwedari, Kec. Gunung Puyuh, Sukabumi
 Telp : (0266) 223446, 235951
 Email : kc.sukabumi@btn.co.id
 Web : www.btn.co.id

Kantor Cabang Cimahi

Jl. Jend. Amir Machmud/Raya Timur No. 475, Cimahi 40524
 Telp : (022) 6651644, 6651645
 Email : kc.cimahi@btn.co.id
 Web : www.btn.co.id

Kantor Cabang Konvensional Wilayah 2 (Kantor Wilayah DKI Jakarta dan Banten)

Kantor Cabang Jakarta Kuningan

Plaza BP Jamsostek, Jl. HR Rasuna Said Kav. 112 – 114 Blok B, Kel. Karet, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan
 Telp : (021) 52964652
 Email : kc.jakartakuningan@btn.co.id
 Web : www.btn.co.id

Kantor Cabang Jakarta Harmoni

Menara BTN
 Jl. Gajah Mada No. 1, Jakarta Pusat 10130
 Telp : (021) 6336789, 6332666, 2310490
 Email : kc.jakartaharmoni@btn.co.id
 Web : www.btn.co.id

Kantor Cabang Kelapa Gading Square

Gedung Emerald Tower
 Jl. Boulevard Barat Blok XB No. 3 Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240
 Telp : (021) 45866883, 45866884
 Email : kc.kelapagadingsquare@btn.co.id
 Web : www.btn.co.id

Kantor Cabang Jakarta Kebon Jeruk

Jl. Angrek No. 01 Kel. Kelapa Dua Kec. Kebon Jeruk, Kebon Jeruk 11550
 Telp : (021) 53666345
 Email : kc.jakartakebonjeruk@btn.co.id
 Web : www.btn.co.id

Kantor Cabang Jakarta Cawang

Gedung Yodya Tower Lt. 1-3, Jl. Mayjen DI Panjaitan Kav 8, RT 003, RW 011, Kel. Cipinang Cempedak, Kec. Jatinegara, Jakarta Timur 13340
 Telp : (021) 22986826, 22986827
 Email : kc.jakartacawang@btn.co.id
 Web : www.btn.co.id

Kantor Cabang Tangerang

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 01 Tangerang 15118
 Telp : (021) 5539363
 Email : kc.tangerang@btn.co.id
 Web : www.btn.co.id

Kantor Cabang Ciputat

Jl. Dewi Sartika No. 21 Ciputat, Tangerang Selatan 15411
 Telp : (021) 7445145
 Email : kc.ciputat@btn.co.id
 Web : www.btn.co.id

Kantor Cabang Jakarta Melawai

Jl. Melawai Raya No. 19 C-D, Kel. Melawai, Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan
 Telp : (021) 27517843, 27517840
 Email : kc.jakartamelawai@btn.co.id
 Web : www.btn.co.id

Kantor Cabang Bumi Serpong Damai

Kompleks BSD, Ruko Sektor VII E Blok K No. 8 Jl. Raya Serpong, Tangerang 15310
 Telp : (021) 5372235, 5372237
 Email : kc.bumiserpongdamai@btn.co.id
 Web : www.btn.co.id

Kantor Cabang Karawaci

Perumnas Karawaci I
 Jl. Cendrawasih No. 1, Tangerang 15115
 Telp : (021) 5517849, 5517850
 Email : kc.karawaci@btn.co.id
 Web : www.btn.co.id

Kantor Cabang Cilegon

Jl. Sultan Ageng Tirtayasa No. 49, Cilegon 42414
 Telp : (0254) 391766, 392681, 393479
 Email : kc.cilegon@btn.co.id
 Web : www.btn.co.id

Kantor Cabang Jakarta Pluit

Jl. Pluit Kencana Raya No. 79, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara 14440
 Telp : (021) 66607390, 66607391, 66607392
 Email : kc.jakartapluit@btn.co.id
 Web : www.btn.co.id

Kantor Cabang Bintaro Jaya

CBD Bintaro Blok B7 No. A3 - 04A, Kel. Pondok Jaya, Kec. Pondok Aren, Tangerang Selatan
 Telp : (021) 22215981
 Email : kc.bintarojaya@btn.co.id
 Web : www.btn.co.id

Kantor Cabang Konvensional Wilayah 3 (Kantor Wilayah Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara)

Kantor Cabang Surabaya Jl. Pemuda No. 50, Surabaya 60271 Telp : (031) 5353513, 5353519 Email : kc.surabaya@btn.co.id Web : www.btn.co.id	Kantor Cabang Denpasar Jl. Dewi Sartika No. 2, Denpasar 80114 Telp : (0361) 243811 Email : kc.denpasar@btn.co.id Web : www.btn.co.id	Kantor Cabang Sidoarjo Jl. Ahmad Yani No. 15, Sidoarjo 61212 Telp : (031) 8929211, 8957949, 8957950 Email : kc.sidoarjo@btn.co.id Web : www.btn.co.id
Kantor Cabang Malang Jl. Ade Irma Suryani No. 2-4, Malang 65119 Telp : (0341) 323956 Email : kc.malang@btn.co.id Web : www.btn.co.id	Kantor Cabang Mataram Jl. Pejanggalik No. 99-101 Cakranegara, Mataram 83121 Telp : (0370) 631186, 638289 Email : kc.mataram@btn.co.id Web : www.btn.co.id	Kantor Cabang Surabaya Bukit Darmo Jl. Mayjend HR Muhammad Kav. 399 Kel. Putat Gede, Kec. Sukomanunggal Telp : (031) 7323344 E-mail : kc.surabayabukitdarmo@btn.co.id Web : www.btn.co.id
Kantor Cabang Bangkalan Jl. Teuku Umar No. 16, Kel. Kemayoran, Kec. Bangkalan 69116 Telp : (031) 3098929, 3098831, 3098930 Email : kc.bangkalan@btn.co.id Web : www.btn.co.id	Kantor Cabang Kupang Jl. Jend. Sudirman No. 87, Kupang 85119 Telp : (0380) 831004 Email : kc.kupang@btn.co.id Web : www.btn.co.id	Kantor Cabang Madiun Jl. Dr. Sutomo No. 38, Madiun 63117 Telp : (0351) 451460, 459034, 457927, 459500, 459600 Email : kc.madiun@btn.co.id Web : www.btn.co.id
Kantor Cabang Mulyosari Jl. Raya Mulyosari No. 82, Kel. Dukuh Sutorejo, Kec. Mulyorejo, Kota. Surabaya 60112 Telp : (031) 5931763 Email : kc.mulyosari@btn.co.id Web : www.btn.co.id	Kantor Cabang Kediri Jl. Diponegoro No. 22 - 24, Kediri 64121 Telp : (0354) 691260, 691262 Email : kc.kediri@btn.co.id Web : www.btn.co.id	Kantor Cabang Jember Jl. A. Yani No. 05, Jember 68118 Telp : (0331) 484611, 489292, 489266 Email : kc.jember@btn.co.id Web : www.btn.co.id
Kantor Cabang Banyuwangi Jl. Brawijaya No. B-1 dan B-2, Kel. Sobo, Kec. Banyuwangi, Kab. Banyuwangi 68418 Telp : (0333) 414490, 415690 Email : kc.banyuwangi@btn.co.id Web : www.btn.co.id	Kantor Cabang Gresik Kompleks Pertokoan Multi Sarana Plaza Blok C 01 No. 1, Jl. Gubernur Suryo, Gresik 61118 Telp : (031) 3973455 Email : kc.gresik@btn.co.id Web : www.btn.co.id	Kantor Cabang Mojokerto Jl. Majapahit No. 130 - 134 Blok1-2, Mojokerto 61323 Telp : (0321) 323850, 323853 Email : kc.mojokerto@btn.co.id Web : www.btn.co.id
Kantor Cabang Singaraja Jalan Ahmad Yani No. 190, Kelurahan Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng Telp : (0362) 21856 Email : kc_singaraja@btn.co.id Web : www.btn.co.id		

Kantor Cabang Konvensional Wilayah 4 (Kantor Wilayah Sumatera)

Kantor Cabang Medan Jl. Pemuda No. 10A, Medan 20151 Telp : (061) 4149777 Email : kc.medan@btn.co.id Web : www.btn.co.id	Kantor Cabang Palembang Jl. Jend. Sudirman Km. 4, 5 No. 125, Palembang 30128 Telp : (0711) 411175, 410552 Email : kc.palembang@btn.co.id Web : www.btn.co.id	Kantor Cabang Padang Jl. H. R. Rasuna Said No. 3, Jati Baru Padang Tim, Kota Padang 25129 Telp : (0751) 31903, 32094, 32096 Email : kc.padang@btn.co.id Web : www.btn.co.id
Kantor Cabang Batam Jl. Engku Putri No.1, Kel. Belian Nongsa Batam Center Telp : (0778) 470630, 470625, 470628 Email : kc.batam@btn.co.id Web : www.btn.co.id	Kantor Cabang Pekanbaru Jl. Jend. Sudirman No. 393, Pekanbaru 28116 Telp : (0761) 40494, 40185, 40188 Email : kc.pekanbaru@btn.co.id Web : www.btn.co.id	Kantor Cabang Jambi Jl. H. M. Yusuf Singadikane No. 146, Jambi 36122 Telp : (0741) 61793, 61792 Email : kc.jambi@btn.co.id Web : www.btn.co.id
Kantor Cabang Pematang Siantar Jl. Sutomo No. 5 G-H, Kel. Proklamasi Kec. Pematang Siantar Barat, Pematang Siantar Telp : (0622) 28887 Email : kc.pematangsiantar@btn.co.id Web : www.btn.co.id	Kantor Cabang Bandar Lampung Jl. Wolter Monginsidi No. 80-88, Bandar Lampung 35215 Telp : (0721) 489253, 489255, 484778, 483256 Email : kc.bandarlampung@btn.co.id Web : www.btn.co.id	Kantor Cabang Bengkulu Jl. Soeprapto No. 7 - 8, Bengkulu 38223 Telp : (0736) 20875 Email : kc.bengkulu@btn.co.id Web : www.btn.co.id

Kantor Cabang Tanjung Pinang

Jl. D.I. Panjaitan Km. 9 Komplek Plaza Bintang
Center Blok Bunga No. 9-12, Tanjung Pinang
Telp : (0771) 7447101, 7447088
Email : kc.tanjungpinang@btn.co.id
Web : www.btn.co.id

Kantor Cabang Pangkal Pinang

Jl. Perniagaan, Mall Bangka Trade
Center B11 - B14, Pangkal Pinang
Telp : (0717) 423748
Email : kc.pangkalpinang@btn.co.id
Web : www.btn.co.id

Kantor Cabang Konvensional Wilayah 5 (Kantor Wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua)**Kantor Cabang Makassar**

Jl. Kajaalido No. 4, Makassar 90111
Telp : (0411) 316016, 316011
Email : kc.makassar@btn.co.id
Web : www.btn.co.id

Kantor Cabang Banjarmasin

Jl. R. E. Martadinata No. 4,
Banjarmasin 70111
Telp : (0511) 4368133, 4366669,
4366670
Email : kc.banjarmasin@btn.co.id
Web : www.btn.co.id

Kantor Cabang Samarinda

Jl. RE. Martadinata No. 01,
Samarinda 75127
Telp : (0541) 736930, 731695, 731510
Email : kc.samarinda@btn.co.id
Web : www.btn.co.id

Kantor Cabang Pontianak

Jl. Imam Bonjol No. 29, Pontianak 78122
Telp : (0561) 740163
Email : kc.pontianak@btn.co.id
Web : www.btn.co.id

Kantor Cabang Balikpapan

Jl. Jend. Sudirman No. 141, Balikpapan
Telp : (0542) 420333
Email : kc.balikpapan@btn.co.id
Web : www.btn.co.id

Kantor Cabang Parepare

Jl. Andi Makkasau No 115-117, Lakessi,
Kec. Soreang, Kota.
Parepare, Sulawesi Selatan 91131
Telp : (0421) 28115
Email : kc_parepare@btn.co.id
Web : www.btn.co.id

Kantor Cabang Banjarbaru

Jl. Ahmad Yani Km 33 RT 01 RW 01
Loktabak Utara, Banjarbaru,
Kalimantan Selatan 71114
Telp : (0511) 6749738, 6749831
Email : kc.banjarbaru@btn.co.id
Web : www.btn.co.id

Kantor Cabang Manado

Jl. Wolter Monginsidi No. 56,
Manado 95115
Telp : (0431) 868095, 855504, 855505
Email : kc.manado@btn.co.id
Web : www.btn.co.id

Kantor Cabang Jayapura

Jl. Koti No. 22, Jayapura 99111
Telp : (0967) 537970, 537971, 537973
Email : kc.jayapura@btn.co.id
Web : www.btn.co.id

Kantor Cabang Kendari

Jl. A. Yani, Komplek A. Yani Square
Blok. A6-7, Kendari 93117
Telp : (0401) 322101
Email : kc.kendari@btn.co.id
Web : www.btn.co.id

Kantor Cabang Ambon

Jl. Diponegoro No. 75B, Ambon
Telp : (0911) 355882, 354471, 348552,
355882
Email : kc.ambon@btn.co.id
Web : www.btn.co.id

Kantor Cabang Tarakan

Jl. Mulawarman No. 10, RT. 73 Kel. Karang
Anyar, Kec. Tarakan Barat, Kota Tarakan
Telp : (0551) 24322
Email : kc.tarakan@btn.co.id
Web : www.btn.co.id

Kantor Cabang Palu

Jl. Jend. Sudirman No. 2, Palu 94111
Telp : (0451) 424555, 428555
Email : kc.palu@btn.co.id
Web : www.btn.co.id

Kantor Cabang Palangkaraya

Jl. Diponegoro No. 23,
Palangkaraya 73111
Telp : (0536) 3220602, 3223975
Email : kc.palangkaraya@btn.co.id
Web : www.btn.co.id

Kantor Cabang Gorontalo

Jl. Nani Wartabone No. 3, Kel. Limba U I,
Kec. Kota Selatan, Kota. Gorontalo
Telp : (0435) 830490, 829481
Email : kc.gorontalo@btn.co.id
Web : www.btn.co.id

Kantor Cabang Ternate

Jl. Pahlawan Revolusi No. 152 Kel.
Gamalama, Ternate Tengah,
Maluku Utara 97721
Telp : (0921) 3111330
Email : kc.ternate@btn.co.id
Web : www.btn.co.id

Kantor Cabang Panakkukang

Jl. Hertasning Blok I No. 2,
Makassar 90222
Telp : (0411) 868831, 868833
Email : kc.panakkukang@btn.co.id
Web : www.btn.co.id

Kantor Cabang Mamuju

Jl KS Tubun No 18, Kabupaten Mamuju
Telp : (0426) 22389
Email : kc.mamuju@btn.co.id
Web : www.btn.co.id

Kantor Cabang Konvensional Wilayah 6 (Kantor Wilayah Jawa Tengah dan DIY)**Kantor Cabang Semarang**

Jl. M.T. Haryono No. 717, Semarang 50242
Telp : (024) 312151, 446166
Email : kc.semarang@btn.co.id
Web : www.btn.co.id

Kantor Cabang Yogyakarta

Jl. Jend. Sudirman No. 71,
Yogyakarta 55223
Telp : (0274) 589898, 581014, 581016
Email : kc.yogyakarta@btn.co.id
Web : www.btn.co.id

Kantor Cabang Solo

Jl. Slamet Riyadi No. 282, Solo 57141
Telp : (0271) 726930
Email : kc.solo@btn.co.id
Web : www.btn.co.id

Kantor Cabang Pekalongan

Jl. Merdeka No. 7, Pekalongan 51113
Telp : (0285) 433883, 433884, 433484,
433917, 413222
Email : kc.pekalongan@btn.co.id
Web : www.btn.co.id

Kantor Cabang Purwokerto

Jl. Jend. Sudirman No. 431,
Purwokerto 53116
Telp : (0281) 641114
Email : kc.purwokerto@btn.co.id
Web : www.btn.co.id

Kantor Cabang Tegal

Jl. Gajah Mada No. 33, Tegal
Telp : (0283) 343050, 343835, 323038
Email : kc.tegal@btn.co.id
Web : www.btn.co.id

Kantor Cabang Kudus

Jl. AKBP Agil Kusumadya No 32,
Kecamatan Jati Kudus
Telp : (0291) 438732
Email : kc.kudus@btn.co.id
Web : www.btn.co.id

Kantor Cabang Magelang

Jl. Tentara Pelajar No. 40, Magelang 56116
Telp : (0293) 3215983
Email : kc.magelang@btn.co.id
Web : www.btn.co.id

Kantor Cabang Syariah
Kantor Cabang Syariah Wilayah 1 (Kantor Wilayah Jawa Barat)
Kantor Cabang Syariah Bandung

Jl. Diponegoro No. 8, Bandung
Kel. Citarum, Kec. Bandung Wetan,
Bandung 40115
Telp : (022) 4265472, 4265473,
4265474
Email : kcs.bandung@btn.co.id
Web : www.btn.co.id

Kantor Cabang Syariah Cirebon

Jl. Raden Ajeng Kartini No. 68,
Kel. Sukapura, Kec. Kejaksan, Cirebon
Telp : (0231) 235485, 235486, 235488
Email : kcs.cirebon@btn.co.id
Web : www.btn.co.id

Kantor Cabang Syariah Karawang

Jl. Kertabumi no 29 C-D, Kel. Nagasari,
Kec. Karawang Barat,
Kab. Karawang 41311
Telp : 0267 - 8400888, 8400999
Email : kcs.karawang@btn.co.id
Web : www.btn.co.id

Kantor Cabang Syariah Bekasi

Jl. Ahmad Yani, Ruko Sentra Niaga Kalimalang
Blok A.IV No.5-6 dan Blok B No. 1
Kel. Kayuringin Jaya, Kec. Bekasi Selatan,
Kota Bekasi 17144
Telp : (021) 8893333
Email : kcs.bekasi@btn.co.id
Web : www.btn.co.id

Kantor Cabang Syariah Tasikmalaya

Jl. Yudanegara No. 10, Kel. Yudanegara
Kec. Cihideung
Kota Tasikmalaya 46112
Telp : (0265) 310612, 7296566,
7296567, 7296568
Email : kcs.tasikmalaya@btn.co.id
Web : www.btn.co.id

Kantor Cabang Syariah Bogor

Jl. Jendral Sudirman No. 01, Kec. Bogor
Tengah, Bogor 16121
Telp : (0251) 8327171, 8327575
Email : kcs.bogor@btn.co.id
Web : www.btn.co.id

Kantor Cabang Syariah Depok

Jl. Margonda Raya No. 438B-D, Kel. Pondok
Cina, Kec. Beji, Kota Depok
Telp : (021) 7867661
Email : kcs.depok@btn.co.id
Web : www.btn.co.id

Kantor Cabang Syariah Wilayah 2 (Kantor Wilayah DKI Jakarta & Banten)
Kantor Cabang Syariah Jakarta Harmoni

Jl. Suryo Pranoto No. 9 B-D, Kel. Petojo
Selatan Kec. Gambir Jakarta Pusat 10130
Telp : (021) 3860617, 3860620, 3864265
Email : kcs.jakartaharmoni@btn.co.id
Web : www.btn.co.id

Kantor Cabang Syariah Serang

Jl. Jend Ahmad Yani No. 175, Cipete
Kel. Sumur Pecung, Kec. Serang,
Kota Serang - Banten
Telp : (0254) 7915869
Email : kcs.cilegon@btn.co.id
Web : www.btn.co.id

Kantor Cabang Syariah Tangerang

Jl. Serpong Raya, Ruko Villa Melati Mas Blok.
SR-1 No. 23-24, Serpong - Tangerang 15320
Telp : (021) 5370773
Email : kcs.tangerang@btn.co.id
Web : www.btn.co.id

Kantor Cabang Syariah Jakarta Pasar Minggu

Ruko Grand Palace Blok G & H,
Jl. Raya Ps. Minggu Km 16 Pancoran,
Jakarta Selatan
Telp : (021) 7993662, 7993015
Email : kcs.pasarminggu@btn.co.id
Web : www.btn.co.id

Kantor Cabang Syariah Wilayah 3 (Kantor Wilayah Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara)
Kantor Cabang Syariah Surabaya

Jl. Diponegoro No. 29, Surabaya 60271
Telp : (031) 5666363, 5610518
Email : kcs.surabaya@btn.co.id
Web : www.btn.co.id

Kantor Cabang Syariah Malang

Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 87,
Kel. Rampil Celaket, Kec. Klojen,
Kota Malang 65112
Telp : (0341) 3012469
Email : kcs.malang@btn.co.id
Web : www.btn.co.id

Kantor Cabang Syariah Mataram

Jl. Pejanggik No. 18-19
Kel. Cakranegara, Kab. Mataram
Telp : (0370) 7503646
Email : kcs.mataram@btn.co.id
Web : www.btn.co.id

Kantor Cabang Syariah Jember

Jl Hayam Wuruk No 16 Kelurahan Kaliwates
Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember
Telp : (0331) 491009, 491010
Email : kcs.jember@btn.co.id
Web : www.btn.co.id

Kantor Cabang Syariah Wilayah 4 (Kantor Wilayah Sumatera)**Kantor Cabang Syariah Batam**

Jl. Sriwijaya Komp. Regency Park Lot 29,
Pelita, Batam 29432
Telp : (0778) 421921
Email : kcs.batam@btn.co.id
Web : www.btn.co.id

Kantor Cabang Syariah Medan

Jl Diponegoro No 34 Kel. Madras Hulu
Kec. Medan Polonia, Kota Medan
Telp : (061) 4144554
Email : kcs.medan@btn.co.id
Web : www.btn.co.id

Kantor Cabang Syariah Pekanbaru

Jl Jendral Sudirman No 203 C D E F G,
Kel. Tangkerang Tengah, Kec. Merpoyan
Damai, Kota Pekanbaru 28128
Telp : (0761) 7891314
Email : kcs.pekanbaru@btn.co.id
Web : www.btn.co.id

Kantor Cabang Syariah Palembang

Jl. A Rivai No. 221, Kel. 26 Ilir D.1, Kec. Ilir
Barat I, Palembang, Sumatera Selatan
Telp : (0711) 365808, 354001, 353230
Email : kcs.palembang@btn.co.id
Web : www.btn.co.id

Kantor Cabang Syariah Banda Aceh

Jl. H.M Daud Beureuh No. 39, Desa. Kuta
Alam, Kec. Kuta Alam, Kota. Banda Aceh
Telp : (0651) 40331
Email : kcs.bandaaceh@btn.co.id
Web : www.btn.co.id

Kantor Cabang Syariah Bengkulu

Jl. S. Parman No. 24, Kel. Penurunan,
Kec. Ratu Samban,
Kota Bengkulu
Telp : (0736) 78604566
Email : kcs.bengkulu@btn.co.id
Web : www.btn.co.id

Kantor Cabang Syariah Jambi

Jl. Hayam Wuruk No. 27, Kel. Cempaka Putih,
Kec. Jelutung, Kota Jambi
Telp : (0741)- 3620645, 3620687
Email : kcs.jambi@btn.co.id
Web : www.btn.co.id

Kantor Cabang Syariah Padang

Jl. Belakang Olo No. 47, Kel. Kp Jao,
Kec. Padang Barat, Padang
Telp : (0751)- 8954842, 8954832
Email : kcs.padang@btn.co.id
Web : www.btn.co.id

Kantor Cabang Syariah Bandar Lampung

Jl Kartini No 85, Kel. Palapa,
Kec. Tanjung Karang Pusat,
Kota Bandar Lampung 35116
Telp : (0751)- 6025555
Email : kcs.bandarlampung@btn.co.id
Web : www.btn.co.id

Kantor Cabang Syariah Wilayah 5 (Kantor Wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua)**Kantor Cabang Syariah Makassar**

Jl A.P Pettarani No 21, Tamamaung,
Kec. Panakkukang,
Kota Makassar 90231
Telp : (0411) 3613399
Email : kcs.makassar@btn.co.id
Web : www.btn.co.id

Kantor Cabang Syariah Banjarmasin

Jl. Jend Ahmad Yani KM 5,5 No. 456
Kel. Pemurus Luar, Kec. Banjarmasin Timur
Kota Banjarmasin
Telp : (0511) 3250530, 3250540,
3250560
Email : kcs.banjarmasin@btn.co.id
Web : www.btn.co.id

Kantor Cabang Syariah Palu

Jl. Emmy Saelan No. 36, Kel. Tatura Utara,
Kec. Palu Selatan, Kota Palu 94236
Telp : (0451) - 485431
Email : kcs.palu@btn.co.id
Web : www.btn.co.id

Kantor Cabang Syariah Balikpapan

Jl. Jenderal Sudirman No. 565 – 566,
Balikpapan 76114
Telp : (0542) 742260, 742258
Email : kcs.balikpapan@btn.co.id
Web : www.btn.co.id

Kantor Cabang Syariah Kendari

Jl. MT Haryono No. 78 Kel. Bende,
Kec. Baruga, Kota Kendari
Telp : -
Email : kcs.kendari@btn.co.id
Web : www.btn.co.id

Kantor Cabang Syariah Pontianak

Jl Jend Ahmad Yani No 61 G-H, Kelurahan
Bangka Belitang Laut, Kec. Pontianak
Tenggara, Kota Pontianak
Telp : (0561) - 8171285
Email : kcs.pontianak@btn.co.id
Web : www.btn.co.id

Kantor Cabang Syariah Wilayah 6 (Kantor Wilayah Jawa Tengah & DIY)**Kantor Cabang Syariah Yogyakarta**

Jl. Faridan M Noto No. 10, Kota Baru Gondokusuman,
Yogyakarta 55224
Telp : (0274) 551055, 512467
Email : kcs.yogyakarta@btn.co.id
Web : www.btn.co.id

Kantor Cabang Syariah Solo

Jl. Brigjen Slamet Riyadi No. 332, Solo 57141
Telp : (0271) 712127, 7008978, 7008947
Email : kcs.solo@btn.co.id
Web : www.btn.co.id

Kantor Cabang Syariah Tegal

Jl. Jenderal Sudirman No. 02 , Kel. Pekauman, Kec. Tegal Barat,
Kota Tegal 52113
Telp : (0283) 342923 ,342933
Email : kcs.tegal@btn.co.id
Web : www.btn.co.id

Kantor Cabang Syariah Semarang

Jl. Achmad Yani No. 181 Kel. Wonodri
Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang
Telp : (024) 8449918, 8449919
Email : kcs.semarang@btn.co.id
Web : www.btn.co.id

Jaringan Mitra Usaha

Perseroan senantiasa menjalin kerja sama dengan berbagai mitra usaha, dengan tujuan untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Perseroan juga menjalankan berbagai kemitraan bisnis dalam rangka penyediaan layanan produk perbankan serta kenyamanan transaksi yang dilakukan oleh nasabah. Bentuk kerja sama yang dilakukan oleh Perseroan dengan mitra usaha di antaranya sebagai berikut:

Grup/Perusahaan	Keterangan
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	Aplikasi E-Panjar dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
Telkomsel	TCASH-BTN
Komite Olimpiade Indonesia (KOI)	KPR Atlet
PT Aviati Pariwisata Indonesia (Persero) & Grup Usaha (PT Angkasa Pura I dan PT Angkasa Pura II)	Kredit Korporasi - Term Loan dan Investasi
PT PP (Persero) Tbk dan Grup Usahanya (PP Properti, PP Urban dan lainnya)	Konstruksi Properti (Cash Loan dan Non Cash Loan)
PT Pertamina (Persero) dan Grup Usahanya (Pertamina EP, Pertamina Hulu Energi, Pertamina Hulu Indonesia dan lainnya)	Kredit Korporasi - Investasi (Sindikasi dan Term Loan)
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dan Grup Usahanya (WIKA Realty, WIKA Gedung, WIKA Industri dan Konstruksi)	Konstruksi Properti (Cash Loan dan Non Cash Loan)
PT Adhi Karya (Persero) Tbk dan Grup Usahanya (Adhi Commuter Properti dan Adhi Persada Properti)	Konstruksi Properti (Cash Loan dan Non Cash Loan) - Termasuk Developer yang mendukung penyediaan unit rumah untuk millennials
Perum Perumnas	Konstruksi Properti (Cash Loan dan Non Cash Loan) - Termasuk Developer yang mendukung penyediaan unit rumah untuk millennials
PT Waskita Karya Realty	Konstruksi Properti
PT Bumi Serpong Damai Tbk	Kredit Korporasi - Term Loan
PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) – ITDC	Kredit Korporasi – Term Loan (Sindikasi)
PT Indonesia Financial Group (IFG)	Kredit Korporasi – Term Loan (Sindikasi)
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Kredit Korporasi - Investasi (Sindikasi - Infrastruktur)
PT Jasamarga Bali Toll	Kredit Korporasi - Investasi (Sindikasi - Infrastruktur)
PT Permodalan Nasional Madani (Persero)	Kredit Korporasi - Modal Kerja
Sinar Mas APP (PT Indah Kiat Pulp & Paper, PT OKI Pulp & Paper dan PT Pindo Deli Pulp & Paper)	Kredit Korporasi (Cash Loan dan Non Cash Loan)
PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)	Kredit Korporasi - Modal Kerja (Cash Loan dan Non Cash Loan)
PT Alam Sutera Realty	Kredit Korporasi – Modal Kerja (Sindikasi)
PT Astakona Megahtama	Kredit Konstruksi
BULOG	Kredit Korporasi - Modal Kerja
Ciputra Residence	Kredit Korporasi - Modal Kerja
PT Nindya Karya	Kredit Korporasi - Kontraktor
PT Yodya Karya	Kredit Korporasi – Kontraktor
PT Virama Karya	Kredit Korporasi - Kontraktor
PT LEN Industri	Kredit Korporasi - Kontraktor
PT Lippo Cikarang	Kredit Korporasi - Modal Kerja
PT Pupuk Sriwidjaja Palembang	Kredit Korporasi - Investasi Sindikasi
Medco Power Indonesia	Kredit Korporasi - Investasi
Salim Group (PT Mega Akses Persada & PT Air Bersih Jakarta)	Kredit Korporasi - Investasi (Sindikasi)
PT Bandung Indah Permai	Kredit Korporasi - Investasi
Blue Bird	Pembiayaan Perumahan
Grab Indonesia	Kredit KPR

Grup/Perusahaan	Keterangan
Gojek	Kredit KPR
BPKH	Bank Penerima Setoran Ibadah Haji
Kemenag	Bank Penerima Ibadah Haji
Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera)	Kredit KPR
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan (Kementerian PUPR)	Pengelolaan Dana dan Kredit KPR
Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan (Satker PUPR)	Penyaluran Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan
PT Jamkrindo Syariah	Penjaminan Asuransi Pembiayaan
PT Askrindo Syariah	Penjaminan Asuransi Pembiayaan
PT Jasindo Syariah	Penjaminan Asuransi Pembiayaan
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	Sekuritisasi KPR, Pinjaman Refinancing dan Pinjaman FLPP
Kementerian Keuangan Republik Indonesia	Pengelolaan Rekening Satuan Kerja dan Badan Layanan Umum dan Pinjaman Dalam Negeri
Kementerian Agama Republik Indonesia	Kerja sama Terkait Haji
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia	Penyaluran Dana Kartu Indonesia Pintar
Badan Pengelola Keuangan Haji	Pengelolaan dana Haji
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal	Pengelolaan dana
Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup	Pengelolaan dana
Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat	Pengelolaan dana
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan	Pengelolaan dana
Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan	Pengelolaan dana
PT Utama Karya (Persero)	Pengelolaan dana & Kredit Non Cash Loan
PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)	Pengelolaan dana
PT Permodalan Nasional Madani (Persero)	Pengelolaan dana
PT Jaminan Kredit Indonesia	Pengelolaan dana
PT Jamkrindo Syariah	Pengelolaan dana
PT Reasuransi Indonesia Utama	Pengelolaan dana
PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia	Pengelolaan dana
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	Pengelolaan dana
PT Perusahaan Gas Negara Tbk	Pengelolaan dana
PT Ciputra Nusantara	Pengelolaan dana
PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk	Pengelolaan dana
PT Medco Power Indonesia	Pengelolaan dana
PT BFI Finance Indonesia Tbk	Pengelolaan dana
Dana Pensiun Lembaga Keuangan Bank Negara Indonesia	Pengelolaan dana
Dana Pensiun Lembaga Keuangan Bank Rakyat Indonesia	Pengelolaan dana
Dana Pensiun Lembaga Keuangan Tugu Mandiri	Pengelolaan dana
Perusahaan Asuransi Allianz	Pengelolaan dana
Manulife Indonesia	Pengelolaan dana
Sun Life Financial	Pengelolaan dana
Yayasan Kesejahteraan Pegawai Otoritas Jasa Keuangan	Pengelolaan dana
PT Permodalan Nasional Madani (Persero)	Pembiayaan Modal Kerja BTN iB
PT Pabrik Gula Rajawali I, Grup Usaha dari PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)	Pembiayaan Modal Kerja BTN iB
PT Industri Kereta Api "INKA" (Persero)	Pembiayaan Modal Kerja Kontraktor BTN iB
PT Waskita Karya Realty	Pembiayaan Konstruksi BTN iB



Grup/Perusahaan	Keterangan
BPJS Kesehatan	Penerimaan iuran peserta
BPJS Ketenagakerjaan	Penerimaan iuran peserta
Universitas Negeri Yogyakarta	Penerimaan iuran SPP Online
Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya	Penerimaan iuran SPP Online
Universitas Indonesia	Penerimaan iuran SPP Online
Universitas Gajah Mada	Penerimaan iuran SPP Online
Institut Pertanian Bogor	Penerimaan iuran SPP Online
Universitas Negeri Semarang	Penerimaan iuran SPP Online
Universitas Brawijaya Malang	Penerimaan iuran SPP Online
Universitas Mulawarman	Penerimaan iuran SPP Online
Universitas Hasanudin	Penerimaan iuran SPP Online
Bakti Kominfo	Penerimaan Sewa BTS
PDAM Tirtawening	Penerimaan iuran Tagihan Air
PDAM Malanng	Penerimaan iuran Tagihan Air
PDAM Bekasi	Penerimaan iuran Tagihan Air
PDAM Kota Samarinda	Penerimaan iuran Tagihan Air

Brand Perusahaan —



Logogram Primer yang berbentuk atap rumah merepresentasikan misi utama Perseroan untuk memenuhi kebutuhan KPR masyarakat Indonesia. Logogram Primer terdiri dari dua buah pola segi enam dengan ukuran berbeda untuk menggambarkan falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia: **yang besar melindungi dan menumbuhkan yang kecil.**



Logogram Sekunder yang berbentuk garis merah menggambarkan kepercayaan diri dan keandalan Perseroan.

■ Logo Perseroan

Logo Perseroan terdiri dari 4 (empat) elemen yaitu, *logotype*, logogram primer, logogram sekunder dan *tagline*. *Logotype* dan logogram merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dalam setiap penggunaannya di berbagai media.

■ Supergrafik

Supergrafik ini diterapkan pada seluruh desain visual *stationery* Perseroan. Supergrafik berbentuk atap rumah diambil dari aksesoris Logogram Perseroan, simbol panah ke atas memiliki arti selalu optimis menjadi yang terbaik bagi perusahaan maupun *customer/mitra*.

■ Warna

Perseroan memiliki 4 (empat) warna, terdiri dari 3 (tiga) warna primer dan 1 (satu) warna sekunder. 3 (tiga) warna primer (biru, emas dan merah) ditampilkan pada logo Perseroan, sedangkan warna sekunder (kuning) mencerminkan identitas Perseroan sebagai perusahaan yang dinamis dan memiliki semangat tinggi dalam memenuhi harapan masyarakat Indonesia di bidang perbankan.

Warna biru melambangkan kematangan Perseroan dalam mengelola bisnis perbankan dan kebijaksanaan Perseroan dalam mengemban misi pembangunan nasional.

Warna emas melambangkan kredibilitas Perseroan sebagai bank yang solid dalam membuktikan diri sebagai bank yang mendapatkan kepercayaan masyarakat.

Warna merah melambangkan kepercayaan diri Perseroan sebagai bank yang tangguh dalam menjalankan roda bisnis perbankan di Indonesia.



Riwayat Singkat Perusahaan —

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (“Perseroan”) diawali dengan berdirinya *Postspaarbank* pada tahun 1897. Pada tahun 1942, *Postspaarbank* diambil alih oleh Pemerintah Jepang dan berubah nama menjadi *Tyokin Kyoku* atau Kantor Tabungan. Kemudian hal ini berlanjut pada tahun 1945, Pemerintah Indonesia mengambil alih *Tyokin Kyoku* dan mendirikan Kantor Taboengan Pos. Di era paska kemerdekaan, tepatnya pada tahun 1950 Pemerintah Republik Indonesia mengubah nama *Tyokin Kyoku* menjadi Bank Tabungan Pos berdasarkan Undang-undang Darurat No. 9 Tahun 1950 tanggal 9 Februari 1950 dan kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 4 tahun 1963 berganti nama menjadi Bank Tabungan Negara pada tahun 1963 hingga sekarang.

Pada tahun 1974, Pemerintah menunjuk Perseroan sebagai satu-satunya institusi yang menyalurkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR), sejalan dengan Program Pemerintah yang tengah menggalakkan program perumahan untuk rakyat. Di tahun 1976, Perseroan melakukan realisasi pertama kali di Perumahan Tanah Mas Kota Semarang. Pada tanggal 29 April 1989, Perseroan mulai beroperasi sebagai bank umum milik negara. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1992, status Perseroan diubah menjadi perseroan terbatas milik negara (Persero). Akta pendirian Bank sebagai Persero dibuat dihadapan Notaris Muhani Salim, S.H., No. 136 tanggal 31 Juli 1992 dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dengan Surat Keputusan No. C2-6587.HT.01.01.TH.92 tanggal 12 Agustus 1992, serta diumumkan dalam Berita Negara No. 73 tanggal 11 September 1992 Tambahan No. 6A. Pada tahun 1994, Berdasarkan surat keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/55/KEP/DIR tanggal 23 September 1994, Perseroan mendapatkan izin operasi sebagai Bank Devisa dan selanjutnya Perseroan ditunjuk sebagai Bank komersial yang fokus pada pembiayaan rumah pada tahun 2002. Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia untuk melakukan kegiatan umum perbankan berdasarkan prinsip syariah melalui surat No. 6/1350/DPbS tanggal 15 Desember 2004. Perseroan mulai melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah pada tanggal 14 Februari 2005 dengan mulai beroperasinya cabang syariah pertama di Jakarta - Harmoni.

Pada tahun 2009, Perseroan melakukan sekuritisasi KPR pertama di Indonesia. Perseroan melakukan sekuritisasi aset melalui pencatatan transaksi Kontrak Investasi Kolektif – Efek Beragun Aset (KIK-EBA), lalu pada 17 Desember 2009 melakukan Penawaran Umum Saham Perdana/*Initial Public Offering* (IPO) dan listing di Bursa Efek Indonesia.

Tahun 2015, Perseroan berperan penting dalam membantu Program Pemerintah “Program Sejuta Rumah Untuk Rakyat”. Perseroan telah ditunjuk sebagai salah satu Bank yang mendukung program pemerintah melalui pembiayaan KPR. Pada tahun 2017, perjalanan proses transformasi *digital banking* Perseroan terus berlanjut. Dari sisi bisnis, Perseroan terus meningkatkan pelayanan perbankan dengan mengakselerasi tahapan transformasi di era digital, salah satunya dengan membuka *Smart Branch*. *Smart Branch* Perseroan dilengkapi dengan beragam layanan untuk memfasilitasi kebutuhan nasabah dalam memperoleh informasi perbankan, melakukan komunikasi, transaksi, registrasi, dan pembukaan rekening.

Pada tahun 2019, Perseroan menjadi *Housing Market Maker* dan memperkuat posisi sebagai Bank Terbesar ke-5. Selanjutnya, tahun 2022 merupakan tahun yang penting karena merupakan kali kedua Perseroan menggelar *Rights Issue* atau penerbitan saham baru setelah tahun 2012 lalu. *Rights Issue* dimaksud menjadi salah

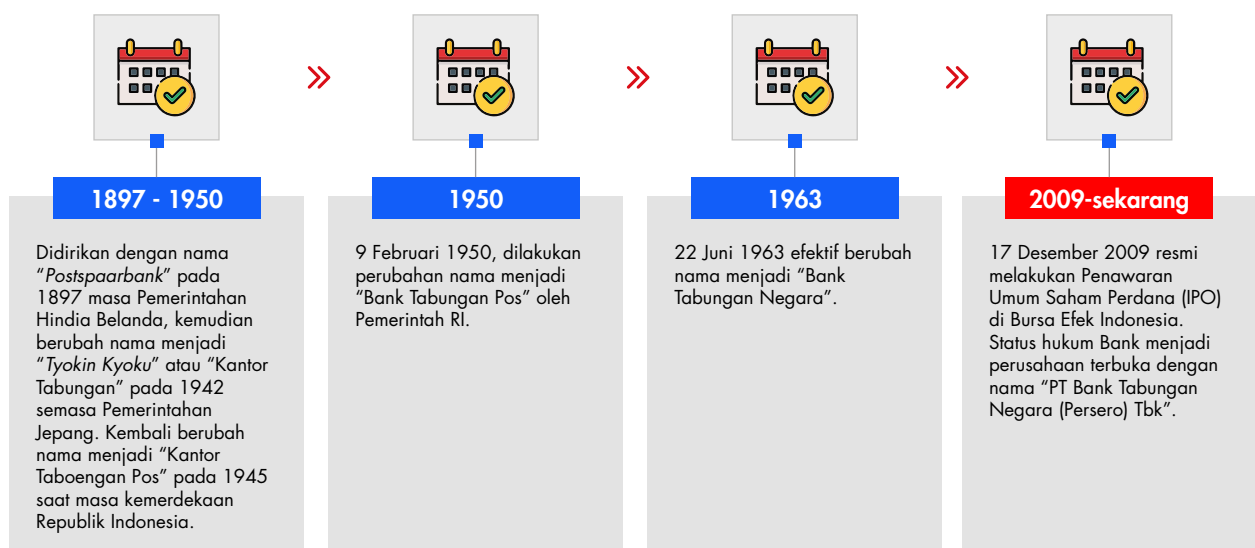




satu upaya Perseroan untuk meningkatkan ekspansi kredit sekaligus memperkuat modal untuk mengawal misi Perseroan Menjadi *The Best Mortgage Bank in Southeast Asia* pada tahun 2025. Tahun 2023, sebagai wujud dari salah satu transformasi *digital banking*, Perseroan merilis BTN Mobile, aplikasi untuk mendukung layanan perbankan melalui ponsel menggantikan *BTN Mobile Banking*.

Keterangan Perubahan Nama

Perseroan memiliki sejarah panjang hingga akhirnya menjadi seperti saat ini, mulai dari nama Bank Tabungan Pos pada tahun 1950 hingga menjadi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.





Visi, Misi dan Budaya Perusahaan —

VISI

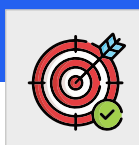
*"Menjadi
The Best Mortgage
Bank in Southeast
Asia pada tahun
2025."*



REVIU VISI DAN MISI OLEH DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Visi dan Misi secara berkala ditinjau dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan eksternal maupun internal. Hasil reviu Visi dan Misi oleh Dewan Komisaris dan Direksi yang dilakukan di tahun 2021 dan rekomendasi dari McKinsey dinyatakan bahwa perumusan Visi dan Misi baru sesuai dengan perubahan kondisi lingkungan eksternal maupun internal dan masih relevan di tahun 2023. Direksi dan Dewan Komisaris telah memastikan bahwa misi, visi, tujuan, sasaran, strategi, dan rencana tahunan dan jangka menengah Perseroan, konsisten dengan tujuan jangka panjang, dengan memanfaatkan inovasi dan teknologi secara efektif. Visi dan Misi baru telah ditetapkan dalam *Corporate Plan* Perseroan Tahun 2021-2025 dan telah dituangkan dalam Rencana Bisnis Bank 2023-2025.

MISI



1

Secara aktif mendukung pemerintah dalam memajukan kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui kepemilikan rumah.

2

Mewujudkan kehidupan yang diimpikan jutaan rakyat Indonesia melalui penyediaan rumah yang layak.

3

Menjadi *One of Home of Indonesia's Best Talent*.

4

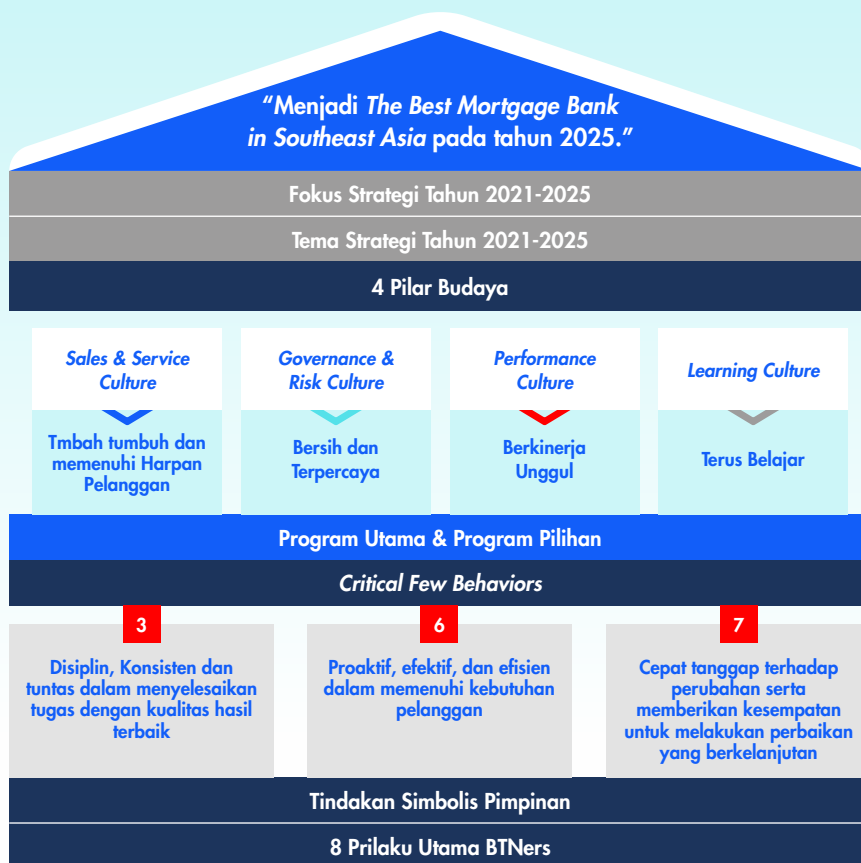
Meningkatkan *shareholder value* dengan berfokus pada pertumbuhan profitabilitas yang berkelanjutan sebagai perusahaan *blue chip* dengan prinsip manajemen risiko yang kokoh.

5

Menjadi mitra keuangan bagi para pemangku kepentingan dalam ekosistem perumahan dengan menyediakan solusi menyeluruh dan layanan terbaik melalui inovasi digital.

Budaya Perusahaan

Perseroan menyadari pentingnya penerapan budaya perusahaan karena dapat mendorong kinerja perusahaan secara signifikan. Perseroan telah beberapa kali memodifikasi budaya perusahaan yang bertujuan untuk memastikan bahwa budaya kerja perusahaan kita tetap relevan dengan lingkungan eksternal dan ekosistem bisnis yang dinamis dan berubah-ubah seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi. Budaya Perseroan saat ini adalah AKHLAK secara berurutan adalah Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif serta diikuti dengan 18 poin yang menjelaskan AKHLAK secara lebih detail adalah fondasi dari budaya perusahaan Perseroan.



8 Perilaku Utama

- 1** Berpegang teguh dan patuh pada nilai moral dan etika bisnis, memenuhi komitmen sesuai peraturan yang berlaku
- 2** Terus belajar, melakukan perbaikan intrapreneurship untuk meningkatkan kompetensi diri dan orang lain
- 3** Disiplin, Konsisten dan tuntas dalam menyelesaikan tugas dengan kualitas hasil terbaik
- 4** Saling menghormati, menghargai dan terbuka terhadap perbedaan

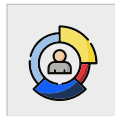
Critical Few Behaviors

18 (DELAPAN BELAS) PANDUAN PERILAKU AKHLAK BAGI BTNers



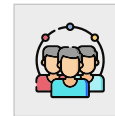
Amanah

- Memenuhi janji dan komitmen.
- Bertanggung jawab atas tugas, keputusan dan tindakan yang dilakukan.
- Berpegang teguh kepada nilai moral dan etika.



Kompeten

- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah.
- Membantu orang lain belajar.
- Menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik.

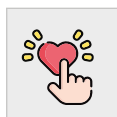


Harmonis

- Menghargai setiap orang apa pun latar belakangnya.
- Suka menolong orang lain.
- Membangun lingkungan kerja yang kondusif.

- 5** Bertanggung jawab dan selalu mengedepankan kepentingan perusahaan
- 6** Proaktif, efektif, dan efisien dalam memenuhi kebutuhan pelanggan 
- 7** Cepat tanggap terhadap perubahan serta memberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan yang berkelanjutan 
- 8** Terbuka untuk bekerja sama yang menghasilkan nilai tambah

-  Sales & Service Culture
-  Governance & Risk Culture
-  Performance Culture
-  Learning Culture



Loyal

- Menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan, BUMN dan Negara.
- Rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar.
- Patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika.



Adaptif

- Cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik.
- Terus-menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi.
- Bertindak proaktif.



Kolaboratif

- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi.
- Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah.
- Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.



Untuk memperkuat dan mendukung tujuan Perseroan dengan berlandaskan 6 (enam) Nilai dan 18 (delapan belas) Panduan Perilaku Utama AKHLAK dan 8 (delapan) Perilaku Utama BTNers, terdapat 4 (empat) pilar budaya dan 15 Tindakan Simbolis Pimpinan sebagai pondasi utama Penerapan Budaya Perusahaan Tahun 2023. Dengan penjelasan sebagai berikut:



Sales & Service Culture


SS1

Melakukan kunjungan ke nasabah 1x sebulan bersama anggota tim dengan agenda *maintaining and deepening relationship, update program-program baru, menggali voice of customer*, dan kolaborasi lintas divisi.

SS2

Melakukan *tracking & enforcement pipeline (lending and funding)* secara bulanan (oleh BOD) dan mingguan (oleh BOD-1).

SS3

Memberikan *award/apresiasi* kepada *best sales champion* secara bulanan (oleh BOD-1) dan 3 bulanan (oleh BOD).

SS4

Memastikan respons dan *follow up* untuk menjawab kebutuhan nasabah (internal dan eksternal), termasuk menghubungkan nasabah dengan unit terkait, tidak lebih dari 3 hari.

Governance & Risk Culture


GR1

Melakukan *checkpoint* dengan anggota tim mengenai kebijakan *existing* yang masih relevan setiap kuartal, termasuk komunikasi perubahan kebijakan ke pegawai dan menjelaskan latar belakang perubahan kebijakan tersebut.

GR2

Melakukan peninjauan kembali setiap keputusan dan proses pengambilan keputusannya berdasarkan SOP dan peraturan perundangan yang berlaku.

GR3

Menyatakan dan tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan jika terdapat *personal interest*.

GR4

Melakukan *surprise visit* dan check secara berkala.

GR5

Pada setiap kesempatan, pimpinan mengingatkan dan memberi contoh kepada pegawai untuk patuh pada aturan perusahaan dan risikonya, serta menindak tegas pelanggaran. Menggunakan *tagline* "Patuhi aturannya, kelola risikonya, tindak tegas pelanggaran."

Performance Culture


PC1

Selalu melakukan *performance business review* di awal dan tengah bulan ditunjang oleh data yang valid dan *daily monitoring*.

PC2

Melakukan *coaching* mengenai bagaimana cara memonitor dan meningkatkan performance unit kerja minimal 3 kali setahun.

PC3

Selalu melakukan pertemuan lintas direktorat/ unit kerja sesuai urgensi perusahaan untuk *alignment* KPI.

Learning Culture


LC1

Secara berkala melakukan *coaching* dan *mentoring* minimal 3 bulan sekali mengenai bagaimana cara mendorong peningkatan produktivitas dan kompetensi anggota tim.

LC3

Melakukan *sharing knowledge* terkait ketentuan yang berlaku, *product knowledge, customer experience, market updates, success story*, dll., minimal setiap bulan sekali di setiap unit kerja dengan *tagline* "Pastikan, Pahami, dan Patuhi."

LC3

Meningkatkan *digital presence* dan mendorong pegawai untuk paham teknologi dan menjadi *digital influencer*.

Kegiatan Usaha

Kegiatan Usaha Menurut Anggaran Dasar dan yang Dijalankan

Perseroan melakukan usaha di bidang perbankan sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 28 tanggal 28 Maret 2023 dibuat oleh Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan yang telah mendapat persetujuan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0023685. AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 20 April 2023. Berdasarkan Anggaran Dasar tersebut, Perseroan melaksanakan kegiatan utamanya sebagai berikut:

No	Ruang Lingkup Kegiatan Usaha Berdasarkan Anggaran Dasar	Sudah/Belum Dijalankan
Kegiatan Usaha Utama		
1.	Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu	Sudah
2.	Memberikan kredit	Sudah
3.	Menerbitkan surat pengakuan hutang	Sudah
4.	Membeli, menjual atau menjaminkan atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:	Sudah
	a. Surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh Perseroan selaku Bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari pada kebiasaan dalam perdagangan surat dimaksud	Sudah
	b. Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat dimaksud	Sudah
	c. Kertas perbendaharaan negara dan Surat Jaminan Pemerintah	Sudah
	d. Sertifikat Bank Indonesia (SBI)	Sudah
	e. Obligasi	Sudah
	f. Surat dagang berjangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Sudah
	g. Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Sudah
5.	Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah	Sudah
6.	Menempatkan dana, meminjam dana dari atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel tunjuk, cek atau sarana lainnya	Sudah
7.	Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga	Sudah
8.	Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga	Sudah
9.	Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak	Sudah
10.	Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di Bursa Efek	Belum
11.	Melakukan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain termasuk melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia	Sudah
12.	Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat	Sudah
13.	Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang;	Sudah
14.	Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan	Belum
15.	Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit, termasuk kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia	Belum
16.	Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan	Sudah
17.	Melakukan kegiatan jasa keuangan, commercial banking, dan investment banking lainnya	Sudah
18.	Melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang dan peraturan perundang-undangan	Sudah
19.	Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.	Sudah
Kegiatan Usaha Penunjang		
1.	Optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk mendukung kegiatan usaha utama sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.	Sudah

Produk dan Jasa

Berdasarkan segmen usaha yang dikembangkan oleh Perseroan, produk dan jasa Perseroan meliputi 2 (dua) segmen yaitu konvensional dan syariah, dengan penjelasan sebagai berikut.





JASA



PERBANKAN KONVENSIIONAL

Electronic Data Capture (EDC)

Electronic channel ATM

BTN Cash Management

Layanan BTN Prioritas

Virtual Account

PLUS by BTN Prioritas

Kartu Debit Visa/GPN & Debit Online

Branchless Banking

Internet Banking

BTN Smart Residence

Portal BTN Properti

Online Onboarding Open Account

Mobile Banking

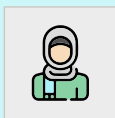
SMS Notifikasi

SKBDN

CRM

Garansi Bank BTN

Jasa dan Layanan Perbankan Lainnya



PERBANKAN SYARIAH/UNIT USAHA SYARIAH

Safe Deposit Box BTN iB

Payroll BTN iB

Garansi Bank BTN iB

Kiriman Uang

Program Pengembangan Operasional BTN iB

BTN Cash Management

SPP Online BTN iB

Payment Poin BTN IB

Penerimaan Biaya Perjalanan Haji

Virtual Account

BTN Mobile

Online Onboarding Open Account

Kartu Debit Visa/GPN Syariah & Debit Online

Ragam Produk

Perbankan Konvensional

Perbankan Konsumer

PRODUK KREDIT KONSUMER

1. Kredit Perumahan

- KPR Bersubsidi BTN

Program untuk Pemilikan Rumah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia yang ditujukan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan suku bunga rendah dan cicilan ringan untuk pembelian rumah umum tapak dan satuan rumah susun umum.

 - KPR FLPP

Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan yang selanjutnya disingkat FLPP adalah dukungan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan Rumah Tapak atau Rumah Susun kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah.
 - KPR TAPERA

KPR Tapera adalah fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank kepada MBR peserta Tapera untuk pembelian Rumah Tapak ataupun Rumah Susun.
 - KBR TAPERA

Fasilitas kredit dari Bank untuk MBR yang menjadi peserta Tapera yang ditujukan untuk Pembangunan Rumah Susun dengan dukungan Pembiayaan Tapera.
 - KRR TAPERA

KRR Tapera adalah fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank kepada MBR peserta Tapera untuk melakukan perbaikan rumah pertama.
- KPR Non Subsidi Kredit pemilikan rumah bagi nasabah segmen menengah ke atas. Layanan KPR non subsidi terdiri dari produk KPR BTN Platinum, KPA BTN dan KP Ruko.
 - KPR BTN Platinum: Kredit pemilikan rumah untuk keperluan pembelian rumah dari *developer* ataupun *non developer*, baik untuk pembelian rumah baru atau *second*, pembelian rumah siap huni (*ready stock*) atau belum jadi (*indent*), maupun *take over* kredit dari Bank lain.
 - KPR Gaess GPM: Merupakan pengembangan fitur dari produk KPR/KPA BTN Platinum untuk memenuhi kebutuhan pembelian rumah atau apartemen untuk calon debitur dari segmentasi generasi milenial (21-35 tahun) dengan berbagai kemudahan dan keunggulan.
 - KPR Atlet Program khusus untuk produk KPR/KPA BTN Platinum yang diperuntukkan bagi atlet-atlet, *official*/manajemen club, pelatih dan wasit, maupun pengurus Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI).

- KPA BTN Kredit pemilikan apartemen untuk keperluan pembelian apartemen dari *developer* ataupun *non developer*, baik untuk pembelian apartemen baru atau *second*, pembelian apartemen siap huni (*ready stock*) atau belum jadi (*indent*), maupun *take over* kredit dari Bank lain.
- KP Ruko BTN Kredit pemilikan ruko untuk membeli unit rumah toko atau rumah kantor.
- Kredit Perumahan Lainnya
 - Kredit Agunan Rumah: Fasilitas kredit yang dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan konsumtif dengan menjaminkan rumah tinggal/apartemen/ruko/rukan.
 - Kredit Bangun Rumah BTN Fasilitas kredit bagi yang ingin membangun rumah di atas tanah milik sendiri.
 - Manfaat Layanan Tambahan BPJS Ketenagakerjaan:
 - ✓ Pinjaman uang muka Perumahan (PUMP) sebagai fasilitas pinjaman uang muka perumahan untuk peserta BPJS Ketenagakerjaan yang mengajukan KPR melalui Bank BTN.
 - ✓ Pinjaman Renovasi Rumah (PRR) sebagai fasilitas pinjaman untuk renovasi rumah bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

2. Kredit Non Perumahan

- Kredit Non Perumahan segmen Konsumer

Kredit Non Perumahan segmen konsumer Bank BTN salah satunya adalah Kredit Konsumtif. Kredit Non Perumahan segmen konsumer mencakup Kredit Ringan BTN (Kring BTN), Kredit Ringan Pra Pensiun (Kring BTN Pra Pensiun), Kredit Ringan Pensiunan (Kring BTN Pensiunan), Kredit Swadana dan Kredit Sejahtera Pegawai.
- Kredit Ringan BTN (Kring BTN)

Fasilitas kredit yang ditujukan bagi karyawan perusahaan/instansi guna memenuhi berbagai kebutuhannya tanpa agunan cukup hanya memanfaatkan SK Pegawai Pemohon.
- Kredit Ringan BTN Pra Pensiun (Kring BTN Pra Pensiun)

Fasilitas kredit yang diberikan kepada calon debitur/debitur dengan sumber pembayaran (*repayment*) berasal dari sumber penghasilan tetap atau *fixed income* (gaji dan uang pensiun) yang gajinya belum atau telah disalurkan melalui bank, yang digunakan untuk keperluan konsumtif. Jangka waktu pembiayaan ini dapat melintasi masa pensiun debitur.
- Kredit Ringan BTN Pensiunan (Kring BTN Pensiunan)

Fasilitas kredit yang ditujukan bagi para pensiunan PNS, TNI/POLRI, maupun janda/duda-nya yang manfaat pensiunnya dibayarkan melalui rekenin di Bank BTN.

- Kredit Swadana BTN
Fasilitas kredit yang diberikan kepada nasabah dengan jaminan berupa tabungan maupun deposito yang disimpan di Bank BTN dengan maksimal penilaian kredit adalah 90% dari dana simpanan nasabah dengan suku bunga kompetitif, proses cepat dan mudah, jangka waktu yang fleksibel sampai dengan 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- Kredit Sejahtera Pegawai
Fasilitas kredit lunak bagi karyawan Bank BTN yang telah memenuhi syarat tertentu.

PRODUK SIMPANAN KONSUMER

1. Tabungan Konsumer

- Tabungan BTN Batara
Tabungan yang memberikan kemudahan dan kenyamanan transaksi perbankan untuk keuangan keluarga melalui *channel* Bank BTN.
- Tabungan BTN Investa
Tabungan investasi unggulan untuk berbagai kebutuhan Anda dengan penarikan dan setoran dana yang fleksibel.
- Tabungan BTN Juara
Tabungan untuk edukasi keuangan dan transaksi sesuai kebutuhan generasi muda untuk usia 12-23 tahun.
- Tabungan Simpanan Pelajar (Simpel)
Tabungan untuk siswa dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik, dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini.
- Tabungan BTN e'BATARAPOS.
Tabungan kerja sama dengan PT Pos Indonesia (Persero) yang memberikan layanan lebih mudah dan dekat melalui loket Kantor Pos online di seluruh Indonesia.
- Tabungan BTN Cermat
Produk tabungan berbasis kartu yang memberikan kemudahan akses bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan belum tersentuh layanan perbankan melalui kerja sama keagenan Bank.
- Tabungan Rekening Dana Nasabah (RDN)
Rekening tabungan yang diselenggarakan oleh Bank dan ditujukan bagi Investor untuk keperluan penyelesaian transaksi pasar modal.
- Tabungan BTN siap!
Tabungan berjangka yang diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan perencanaan masa depan nasabah.
- Tabungan BTN Felas
Produk yang dapat digunakan untuk menabung, bertransaksi dan berinvestasi dalam mata uang asing. Tersedia dalam mata uang USD, SGD, AUD, JPY dan CNY.
- Tabungan Simuda Rumahku
Tabungan berjangka yang diperuntukkan bagi mahasiswa dan pemuda usia 18-30 tahun sebagai sarana edukasi perencanaan kepemilikan rumah sejak dini.

- Tabungan Bisnis
Tabungan BTN Bisnis menghadirkan fitur dan layanan yang memudahkan berbagai kebutuhan bisnis anda dengan dukungan lengkap untuk bisnis yang lebih besar.
- Tabungan BTN Pensiunan
Kenyamanan dan kemudahan bagi Anda, nasabah pensiunan dan calon pensiunan. Tabungan BTN Pensiunan dibuat khusus untuk menyalurkan dana pensiun dengan biaya administrasi yang lebih rendah.
- Tabungan BTN Prima
Tabungan yang memberikan manfaat prima, kemudahan serta bunga yang lebih dari tabungan biasa.

2. Deposito BTN Ritel

Deposito BTN Ritel memberikan kemudahan investasi berjangka dalam mata uang rupiah maupun mata uang asing (USD, SGD) dengan suku bunga bersaing serta sistem penyetoran dan penarikan di waktu tertentu. Dengan pembukaan melalui *Offline* Kantor Cabang dan *Online* melalui BTN Mobile (eDeposito).

3. Giro Perorangan BTN

- Giro Perorangan
Jenis simpanan dalam mata uang Rupiah maupun Valuta Asing yang diselenggarakan oleh Bank yang dibuka oleh orang perorangan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan Cek, Bilyet Giro, dan media penarikan lainnya.
- Giro Gabungan (*Joint Account*)
Rekening yang dimiliki oleh lebih dari satu pemilik rekening perorangan.

PRODUK WEALTH MANAGEMENT

a. Bancassurance

Dalam penawaran produk *bancassurance*, Bank BTN bekerja sama dengan 4 (empat) mitra asuransi yaitu Sinarmas MSIG, Zurich Topas Life, Binagriya Upakara, dan IFG Life.

- Asuransi Jiwa Tradisional
Asuransi yang menawarkan kepastian manfaat asuransi utama yaitu berupa Uang Pertanggungan (UP) jiwa yang dapat disiapkan untuk menghadapi ketidakpastian finansial di masa depan. Bank BTN berkerja sama dengan Sinarmas MSIG, Zurich Topas Life dan IFG Life dalam menawarkan produk asuransi jiwa tradisional yang dapat diperoleh di jaringan Kantor Cabang Bank BTN maupun dapat ditawarkan melalui telemarketing.
- Asuransi Jiwa Unit Link (PAYDI)
Produk Asuransi Unit Link memberikan manfaat Uang Pertanggungan jika terjadi risiko dan manfaat Nilai Tunai yang dapat diperoleh dari bagian premi yang diinvestasikan. Bank BTN bekerjasama dengan Mitra Asuransi Sinarmas MSIG dengan Produk Smart Flexi Optima Link (Single Premium Unit Link).

b. Reksa Dana

Bank sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) bekerjasama dengan 9 (sembilan) Mitra Manajer Investasi

dalam penawaran produk reksa dana, baik reksa dana *open end* maupun reksa dana terproteksi. Mitra Manager Investasi yang bekerja sama dengan Bank adalah sebagai berikut:

1. PT Bahana TCW Investment Management
2. PT Trimegah Asset Management
3. PT Manulife Aset Manajemen Indonesia
4. PT Schroder Investment Management Indonesia
5. PT Danareksa Investment Management
6. PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen
7. PT Insight Investments Management
8. PT Mandiri Manajemen Investasi
9. PT Sucorinvest Asset Management

• **Reksa Dana Pasar Uang**

Jenis reksa dana yang menginvestasikan 100 persen dana kelolaannya pada produk pasar uang seperti Deposito dan surat berharga yang jatuh temponya kurang dari 1 (satu) tahun. Reksa Dana ini cocok untuk Investor pemula dengan profil risiko konservatif. Produk Reksa Dana Pasar Uang antara lain:

- Reksa Dana Bahana Dana Likuid
- Reksa Dana TRIM Kas 2
- Reksa Dana Danareksa Seruni Pasar Uang II
- Reksa Dana Mandiri Investa Pasar Uang
- Reksa Dana Sucorinvest Money Market Fund
- Reksa Dana Mandiri Money Market USD
- Reksa Dana Batavia Dana Kas Maksima

• **Reksa Dana Pendapatan Tetap**

Merupakan jenis reksadana yang menginvestasikan sekurang-kurangnya 80% dari aktivasnya dalam bentuk efek utang atau obligasi. Tujuannya untuk menghasilkan tingkat pengembalian yang stabil. Risikonya relatif lebih besar daripada reksadana pasar uang. Produk Reksa Dana Pendapatan Tetap antara lain:

- Reksa Dana Manulife Pendapatan Bulanan II
- Reksa Dana Manulife USD Fixed Income
- Reksa Dana TRIM Dana Tetap 2
- Reksa Dana Batavia Dana Obligasi Ultima
- Reksa Dana Mandiri Investa Dana Utama
- Reksa Dana Bahana Makara Prima

• **Reksa Dana Campuran**

Merupakan jenis reksadana pengalokasian dana investasinya dalam portofolio yang bervariasi. Instrumen investasinya dapat berbentuk saham dan dikombinasikan dengan obligasi. Tujuannya untuk pertumbuhan harga dan pendapatan. Risiko reksadana campuran bersifat moderat dengan potensi tingkat pengembalian yang relatif lebih tinggi dibandingkan reksadana pendapatan tetap. Produk Reksa Dana Campuran antara lain:

- Reksa Dana Bahana Dana Infrastruktur
- Reksa Dana Schroder Dana Kombinasi
- Reksa Dana Manulife Dana Campuran II
- Reksa Dana TRIM Kombinasi 2
- Reksa Dana Batavia USD Balanced Asia

• **Reksa Dana Saham**

Merupakan jenis reksadana yang menginvestasikan sekurang-kurangnya 80% dari aktivasnya dalam bentuk efek bersifat ekuitas. Tujuannya untuk pertumbuhan harga saham atau unit dalam jangka panjang. Risikonya relatif lebih tinggi dari reksadana pasar uang dan reksadana pendapatan tetap, namun memiliki potensi tingkat pengembalian yang paling tinggi. Produk Reksa Dana Saham antara lain:

- Reksa Dana Bahana Dana Ekuitas Prima
- Reksa Dana TRIM Kapital Plus
- Reksa Dana Manulife Dana Saham Kelas A
- Reksa Dana Manulife Syariah Sektor Amanah Kelas A
- Reksa Dana Danareksa Mawar Konsumer 10
- Reksa Dana Schroder 90 Plus Equity Fund
- Reksa Dana Schroder Dana Prestasi
- Reksa Dana Schroder Dana Prestasi Plus
- Reksa Dana Batavia Dana Saham
- Reksa Dana Manulife Saham Syariah Asia Pasifik Dollar AS
- Reksa Dana Batavia Gloal ESG Sharia Equity
- Reksa Dana Sucorinvest Equity Fund
- Reksa Dana Mandiri FTSE Indonesia ESG – Kelas A

• **Reksa Dana Terproteksi**

Reksa Dana terproteksi atau dikenal dengan Capital Protected Fund (CPF) merupakan jenis reksa dana yang memberikan proteksi atas nilai investasi awal, apabila pemegang unit penyertaan memegang reksadana tersebut hingga tanggal jatuh tempo melalui mekanisme pengelolaan portofolio investasi. Secara periodik reksadana terproteksi juga melakukan pembagian hasil investasi dalam bentuk dividen. Produk Reksa Dana Terproteksi antara lain:

- Reksa Dana Terproteksi Sucorinvest Proteksi 32
- Reksa Dana Terproteksi Sucorinvest Proteksi 42
- Reksa Dana Terproteksi Trimegah Terproteksi Futura 26
- Reksa Dana Terproteksi Trimegah Terproteksi Prima 30
- Reksa Dana Terproteksi Mandiri Seri 215
- Reksa Dana Terproteksi Mandiri Seri 218
- Reksa Dana Terproteksi Mandiri Seri 222
- Reksa Dana Terproteksi Sucorinvest Proteksi 44
- Reksa Dana Terproteksi Trimegah Terproteksi Futura 28
- Reksa Dana Terproteksi Trimegah Terproteksi Lestari 22
- Reksa Dana Terproteksi Insight Terproteksi Proteksi 55
- Reksa Dana Terproteksi Insight Terproteksi Proteksi 58
- Reksa Dana Terproteksi Trimegah Terproteksi Prima 38

c. **Surat Berharga Negara Ritel**

Surat Berharga Negara Ritel (SBN Ritel) adalah instrumen investasi berupa surat utang negara yang diterbitkan oleh

pemerintah Republik Indonesia diperuntukkan bagi investor individu Warga Negara Indonesia di pasar perdana. Pemerintah dalam hal ini sebagai penerbit menjamin pengembalian nilai pokok pada saat jatuh tempo ditambah dengan kupon yang akan dibayarkan secara berkala (Sesuai UU No.24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara). Bank BTN merupakan salah satu mitra distribusi Pemerintah dalam penyaluran SBN Ritel.

- **Obligasi Negara Ritel Indonesia (ORI)**
Merupakan salah satu instrumen SBN Ritel yang diperuntukkan bagi investor individu Warga Negara Indonesia di pasar perdana. ORI memiliki karakteristik dapat diperjual belikan (*tradable*) di pasar sekunder dengan tingkat kupon bersifat tetap (*fixed coupon*).
- **Saving Bond Ritel (SBR)**
Merupakan salah satu instrumen SBN Ritel yang diperuntukkan bagi investor individu Warga Negara Indonesia di pasar perdana. SBR memiliki karakteristik yaitu memberikan tingkat kupon mengambang dengan batas bawah (*floating with floor*) dan mempunyai fasilitas *early redemption* bagi investornya. Namun SBR tidak dapat diperjual belikan (*nontradable*) di pasar sekunder.
- **Sukuk Ritel (SR)**
Merupakan salah satu instrumen Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Ritel yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah serta diperuntukkan bagi investor individu Warga Negara Indonesia di pasar perdana. SR memiliki karakteristik dapat diperjual belikan (*tradable*) di pasar sekunder dan memiliki tingkat imbal hasil (kupon) yang bersifat tetap (*fixed coupon*).
- **Sukuk Tabungan (ST)**
Merupakan salah satu instrumen Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Ritel yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah serta diperuntukkan bagi investor individu Warga Negara Indonesia. ST memiliki karakteristik yaitu memberikan tingkat imbal hasil (kupon) mengambang dengan batas bawah (*floating with floor*) dan mempunyai fasilitas *early redemption* bagi investornya. Namun ST tidak dapat diperjual belikan (*non - tradable*) di pasar sekunder.

d. Surat Berharga Negara Pasar Sekunder

Surat Utang Negara (SUN) yang diterbitkan oleh Pemerintah yang dijual di Pasar Sekunder dan menawarkan fleksibilitas bagi para investor yaitu bisa melakukan aktivitas jual - beli kapan saja (tidak ada periode masa penawaran). Pemerintah dalam hal ini sebagai penerbit menjamin pengembalian nilai pokok pada saat jatuh tempo ditambah dengan kupon yang akan dibayarkan secara berkala (Sesuai UU No. 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara). SBN Pasar Sekunder diperuntukkan bagi investor institusi maupun ritel baik itu domestic maupun asing.

- **Fixed Rate IDR (FR)**
Salah satu seri dari Surat Utang Negara (SUN) atau Obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah dalam denominasi Rupiah dan dijual di Pasar Sekunder dalam jangka waktu tertentu (sesuai dengan tenor dari Obligasi tersebut) dengan kupon tetap. Pemerintah dalam hal ini akan membayarkan kupon secara berkala setiap 6

(enam) bulan (Semester). FR diperuntukkan bagi investor institusi dan ritel baik itu domestic maupun asing.

- **Project Based SUKUK IDR (PBS)**
Salah satu seri dari Surat Utang Negara (SUN) Syariah atau Obligasi Syariah yang diterbitkan oleh Pemerintah dalam denominasi Rupiah dan dijual di Pasar Sekunder dalam jangka waktu tertentu (sesuai dengan tenor dari Obligasi tersebut) dengan kupon tetap. Pemerintah dalam hal ini akan membayarkan kupon secara berkala setiap 6 (enam) bulan (Semester). PBS diperuntukkan bagi investor institusi dan ritel baik itu domestic maupun asing.
- **Fixed Rate USD (INDON)**
Salah satu seri dari Surat Utang Negara (SUN) atau Obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah dalam denominasi USD dan dijual di Pasar Sekunder dalam jangka waktu tertentu (sesuai dengan tenor dari Obligasi tersebut) dengan kupon tetap. Pemerintah dalam hal ini akan membayarkan kupon secara berkala setiap 6 (enam) bulan (Semester). INDON diperuntukkan bagi investor institusi dan ritel baik itu domestic maupun asing.
- **Fixed Rate USD (INDOIS)**
Salah satu seri dari Surat Utang Negara (SUN) berbasis Syariah yang diterbitkan oleh Pemerintah dalam denominasi USD dan dijual di Pasar Sekunder dalam jangka waktu tertentu (sesuai dengan tenor dari Obligasi tersebut) dengan kupon tetap. Pemerintah dalam hal ini akan membayarkan kupon secara berkala setiap 6 (enam) bulan (Semester). INDOIS diperuntukkan bagi investor institusi dan ritel baik itu domestic maupun asing.

e. Foreign Exchange

Foreign exchange merupakan layanan konversi mata uang menggunakan kurs berjalan dengan jangkauan perdagangan di seluruh dunia. Layanan forex Bank BTN tersedia dalam currency USD, JPY, GBP, AUD, HKD, SGD, EUR, MYR, SAR, dan CNY. Target market foreign exchange adalah nasabah perorangan/lembaga dengan kebutuhan valuta asing dalam bentuk simpanan, transaksional transfer atau pembayaran ke luar negeri serta kebutuhan trading valuta asing. Layanan foreign exchange mencakup layanan transaksi Telegraphic Transfer (TT) Overbooking, Outgoing dan Incoming serta layanan transaksi Bank Notes. Selain itu tersedia structured product mencakup SWAP Depo, Produk DCI (Dual Currency Investment) dan Produk MLD (Market Linked Deposit) guna meningkatkan opsi pilihan investasi bagi nasabah Bank BTN.

Perbankan Komersial

1. Produk Kredit Komersial

a. Kredit Perumahan

- **Kredit Modal Kerja (KMK) Konstruksi BTN**
Kredit Konstruksi BTN atau Kredit Yasa Griya (KYG) adalah Kredit Modal Kerja yang diberikan oleh Bank kepada Pengembang/Developer berbentuk badan

usaha badan hukum, badan usaha non badan hukum untuk modal kerja pembiayaan pembangunan bangunan horizontal (rumah tinggal, rumah toko, rumah kantor, kios dan lainnya) maupun bangunan vertikal/*high rise building* (rumah susun, apartemen, kondotel, gedung perkantoran dan lainnya) berikut sarana dan prasarannya, sepanjang berdasarkan penilaian Bank layak/*feasible* untuk diberikan kredit.

- Kredit Pemilikan Lahan (KPL) BTN

Kredit Pemilikan Lahan BTN adalah fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank kepada badan usaha berbadan hukum untuk pengadaan tanah untuk pembangunan rumah sederhana yang pembangunannya menggunakan fasilitas Kredit Konstruksi BTN/KYG.

- b. Kredit Non Perumahan

Kredit Non Perumahan Bank BTN terdiri dari Produk Kredit UMKM, Kredit Komersial lainnya, Linkage Program dan Kredit Korporasi. Kredit UMKM mencakup KUR BTN, KUMKM BTN, dan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (PUMK). Kredit Komersial lainnya mencakup Kredit Investasi, KMK dan KMK Kontraktor. Linkage Program mencakup kredit kepada Bank Perkreditan Rakyat dan Koperasi Simpan Pinjam (Koperasi). Sedangkan Kredit Korporasi mencakup Kredit Investasi, Modal Kerja, Modal Kerja Kontraktor dan Sindikasi.

- Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) BTN

Kredit yang diperuntukkan bagi nasabah yang memiliki usaha produktif dengan kriteria UMKM. Kredit dapat digunakan untuk pembiayaan modal kerja dan/atau investasi dengan maksimal plafon sampai dengan Rp5 Miliar.

- Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (PUMK) Pinjaman yang tujuan pemberiannya untuk membiayai modal kerja untuk kelancaran usaha mitra binaan.

- Kredit Usaha Rakyat (KUR) BTN

Kredit modal kerja dan/atau investasi yang diberikan kepada debitur yang bergerak dalam bidang usaha yang menurut skalanya berstatus sebagai UMKM di bidang usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.

- Kredit Linkage BTN

Kredit Linkage BTN adalah fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank kepada badan usaha berbadan hukum yaitu Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Koperasi untuk diteruskan/dijamin kepada sektor Usaha Kecil dan Mikro (produktif) dan sektor konsumtif.

- Kredit Korporasi

Kredit Korporasi adalah kredit yang diberikan kepada Debitur berbentuk badan usaha berbadan hukum (Persero) dalam rangka memenuhi kebutuhan modal kerja dan/atau kebutuhan investasi.

- Kredit Modal Kerja (KMK) BTN

Kredit Modal Kerja BTN adalah Kredit Modal Kerja yang diberikan oleh Bank kepada badan usaha berbadan hukum maupun badan usaha non badan hukum dalam rangka pembiayaan kebutuhan modal kerja perusahaan.

- Kredit Investasi BTN

Kredit Investasi BTN adalah fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank kepada badan usaha berbadan hukum dan badan usaha non badan hukum, dalam rangka pembiayaan investasi, baik investasi baru, perluasan, modernisasi atau rehabilitasi.

- Kredit Modal Kerja Kontraktor (KMK Kontraktor)

Kredit Modal Kerja BTN Kontraktor adalah Kredit Modal Kerja yang diberikan oleh Bank kepada badan usaha berbentuk badan hukum, badan usaha non badan hukum yang bekerja berdasarkan kontrak dengan pemilik proyek/ usaha untuk modal kerja di dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak kerja yang dimaksud.

- Kredit Sindikasi

Kredit Sindikasi adalah salah satu sistem pembiayaan kredit (kredit investasi, kredit modal kerja, maupun sebagai guarantor) dimana beberapa Bank secara bersama-sama membiayai proyek yang diajukan oleh nasabah dengan syarat-syarat dan ketentuan yang sama.

- *Refinancing*

Refinancing adalah pemberian kredit investasi untuk pembiayaan kembali atas aset produktif Debitur/ Calon Debitur yang telah berjalan dan terlebih dahulu dibiayai dari biaya sendiri oleh Debitur/ Calon Debitur atau pembiayaan dari Bank yang telah dilunasi.

- *Term Loan Facility*

Term Loan Facility adalah fasilitas kredit *non revolving* untuk pembiayaan *Capital Expenditure* dan/atau *Operational Expenditure* jangka menengah atau jangka panjang yang pengembaliannya yang dapat dicicil/diangsur sesuai dengan kemampuan keuangan Debitur.

- *Corporate Line Facility*

Corporate Line Facility adalah suatu bentuk persetujuan penyediaan dana sejumlah batas maksimal tertentu kepada peminjam dalam jangka waktu tertentu berdasarkan hasil analisis dan evaluasi Bank.

- *Treasury Line Facility*

Treasury Line Facility merupakan fasilitas yang diberikan oleh Bank kepada Non Lembaga Keuangan untuk meng-cover transaksi *Foreign Exchange Line*, *Fixed Income Line* maupun fasilitas jenis lainnya yang lazim dilakukan oleh Perbankan.

- **Supply Chain Financing (SCF)**
Supply of Financing adalah suatu portofolio teknik dan praktik pembiayaan yang mendukung perdagangan dan arus keuangan dari awal hingga akhir dari proses bisnis perusahaan.
- **Trust Receipt**
Trust Receipt adalah sistem pembiayaan perdagangan (impor) jangka pendek yang diberikan bagi nasabah untuk menunda pembayaran kewajiban atas penebusan L/C maupun *Documentary Collection*.
- **Garansi Bank BTN (*Guarantee*)**
Layanan jasa perbankan yang dapat diberikan kepada nasabah dalam bentuk penjaminan terhadap suatu kondisi yang harus dipenuhi oleh pihak pemohon penjaminan.

Produk dan layanan *Guarantee* yang meliputi Bank Garansi Lokal, *Standby Letter of Credit*, *Demand Guarantee* dan Surat Keterangan Dukungan Bank yaitu:

- Bank Garansi Lokal adalah jaminan pembayaran yang diberikan oleh Bank kepada *Obligee* apabila *Principal* melakukan wanprestasi.
- SBLC (*Standby Letter of Credit*) adalah jaminan yang berlaku secara internasional, diterbitkan oleh Bank atas permohonan dari *applicant* untuk menjamin penggantian kerugian kepada *beneficiary* atas kondisi wanprestasi yang dilakukan *applicant* ataupun dapat juga digunakan untuk menjamin pembayaran atas prestasi yang telah dilakukan *beneficiary* sesuai syarat dan kondisi SBLC.
- DG (*Demand Guarantee*) adalah jaminan yang berlaku secara internasional, diterbitkan oleh Bank/Guarantor berdasarkan permohonan *applicant* untuk membayar kepada *beneficiary* dengan jumlah maksimum sesuai yang tercantum dalam DG atas kondisi wanprestasi yang dilakukan oleh *applicant*.
- Surat Keterangan Dukungan Bank (SKDB) merupakan Surat keterangan dukungan keuangan yang diterbitkan oleh Bank kepada nasabah untuk tujuan tertentu.
- Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) atau *Letter of Credit (L/C)*
Adalah setiap janji tertulis berdasarkan permintaan tertulis Pemohon (*Applicant*) yang mengikat Bank Pembuka (*Issuing Bank*) untuk:
 - Melakukan pembayaran kepada Penerima atau *order*-nya atau mengaksep membayar wesel yang diterima oleh Bank
 - Memberi kuasa kepada bank lain untuk melakukan pembayaran kepada Penerima atau *order*-nya atau mengaksep dan membayar wesel yang ditarik oleh penerima, atau

- Memberi kuasa kepada bank lain untuk menegosiasi wesel yang ditarik oleh Penerima.

- ***Documentary Collection***
Merupakan layanan transaksi non L/C yang diberikan Bank BTN kepada nasabah untuk melakukan penagihan pembayaran atas dasar dokumen bukti pengiriman barang.

2. Produk Simpanan Komersial

a. Giro Lembaga BTN

Jenis simpanan dalam mata uang Rupiah maupun Valuta Asing yang diselenggarakan oleh Bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan Cek, Bilyet Giro, Surat Perintah Pembayaran, pemindahbukuan, dan media penarikan lainnya.

Nasabah Giro Lembaga terdiri dari:

- Instansi pemerintah/lembaga negara dan organisasi kemasyarakatan yang tidak merupakan perusahaan.
- Semua badan hukum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau peraturan perundang-undangan lainnya.
- Perseroan Terbatas (PT), Perusahaan Terbatas Penanaman Modal Asing (PTPMA), Firma (Fa), CV, Yayasan, Lembaga Berbadan Hukum Asing, Partai Politik, Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK), Ormas/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan lainnya.

b. Deposito Berjangka Lembaga

- **Deposito Lembaga**
Simpanan Dana Pihak Ketiga kepada Bank dalam mata uang Rupiah maupun Valuta Asing yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara nasabah dan bank yang bersangkutan. Deposito Berjangka Lembaga dapat diterbitkan dengan jangka waktu 1, 2, 3, 4, 6, 12, dan 24 bulan.
- **Deposito *On Call* Lembaga**
Simpanan Dana Pihak Ketiga kepada Bank dalam mata uang Rupiah maupun Valuta Asing yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara nasabah dan bank yang bersangkutan. Jangka waktu penempatan Deposito *On Call* Lembaga adalah minimal 1 (satu) hari dan maksimal 35 hari atau sesuai kebutuhan nasabah.

Perbankan Syariah/Unit Usaha Syariah

Produk Pembiayaan Syariah

Produk pembiayaan Unit Usaha Syariah dikategorikan menjadi Pembiayaan Konsumer dan Pembiayaan Komersial. Uraian terkait Produk Pembiayaan Usaha Syariah dijabarkan sebagai berikut:

1. Pembiayaan Konsumer

a. KPR BTN Subsidi iB

KPR BTN Subsidi iB adalah produk pembiayaan BTN Syariah guna pembelian rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan margin rendah, dan angsuran yang ringan dan tetap sepanjang jangka waktu pembiayaan dengan skema FLPP, SSM, BP2BT dan Tapera Syariah menggunakan akad *murabahah* (jual beli) serta ada juga skema SSM dan BP2BT yang menggunakan akad *Musyarakah Mutanaqisah* (MMQ) dalam rangka pemilikan rumah tapak dan rumah susun yang merupakan program pemerintah.

b. KPR BTN Platinum iB

Pembiayaan kepada nasabah perorangan dengan akad *murabahah* (jual beli) dengan angsuran tetap sepanjang jangka waktu pembiayaan dalam rangka pemilikan rumah, rumah toko, rumah kantor, rumah susun atau apartemen dalam kondisi baru maupun *second*.

c. Pembiayaan Properti BTN iB (KPR HITS)

Produk pembiayaan yang mengakomodir kebutuhan nasabah generasi milenial yang menginginkan produk KPR syariah dengan angsuran fleksibel. Produk KPR ini menggunakan akad *musyarakah mutanaqisah* (*sharing* kepemilikan) yang disewakan ke nasabah dengan angsuran fleksibel dan dapat digunakan untuk pembiayaan kepemilikan rumah, aset barang lainnya, maupun sistem *refinancing*.

d. KPR BTN Indent iB

Produk pembiayaan dalam rangka pembelian rumah, ruko, rukan, dan rusun/apartemen secara inden (atas dasar pesanan) bagi nasabah perorangan dengan menggunakan prinsip akad *istishna* (jual beli atas dasar pesanan) dengan pengembalian secara tangguh (cicilan bulanan) dalam jangka waktu tertentu.

e. Pembiayaan Bangun Rumah iB

Pembiayaan yang diperuntukkan bagi pemohon perorangan dengan akad *murabahah* (jual beli) dengan tujuan pembiayaan untuk membangun dan atau merenovasi rumah, ruko, atau bangunan lainnya yang dapat dikategorikan sebagai tempat tinggal di atas tanah yang sudah dimiliki oleh Pemohon, baik untuk dipakai sendiri maupun untuk disewakan.

f. Pembiayaan Kendaraan Bermotor (PKB) BTN iB

Pembiayaan kepada Nasabah perorangan dengan akad *murabahah* (jual beli) dalam rangka pemilikan kendaraan bermotor yang diperuntukkan untuk kepentingan pribadi.

g. Pembiayaan Tunai Emas (Tunas) BTN iB

Pembiayaan kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan dana nasabah dengan berdasarkan akad *qardh* (pinjaman tunai), *rahn* (gadai) dan *ijarah* (sewa) yang diberikan Bank kepada Nasabah berdasarkan kesepakatan dan disertai dengan Surat Gadai.

h. Pembiayaan Multijasa BTN iB

Pembiayaan dengan akad *kafalah bil ujroh* yang dapat digunakan untuk keperluan mendanai berbagai kebutuhan layanan jasa bagi nasabah seperti paket

biaya pendidikan, paket biaya pernikahan, paket biaya *travelling* (perjalanan wisata), paket biaya umrah/haji plus, paket biaya kesehatan, paket biaya jasa lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

i. Pembiayaan Multimanfaat BTN iB

Pembiayaan konsumtif perorangan dengan akad *murabahah* yang dapat digunakan untuk keperluan pembelian berbagai jenis barang yang bermanfaat sesuai kebutuhan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, seperti barang elektronik, *furniture* dan alat rumah tangga, serta barang kebutuhan lainnya.

j. Pembiayaan Emasku BTN iB

Pembiayaan kepada nasabah perorangan dengan akad *murabahah* yang digunakan untuk pembelian emas batangan dengan cicilan tetap selama jangka waktu.

2. Pembiayaan Komersial

a. Pembiayaan Konstruksi BTN iB

Fasilitas pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan dana Nasabah berdasarkan akad kerja sama antara Bank untuk menjalankan suatu usaha kerja sama tertentu (*syirkah*) bersama dengan Nasabah yang menjalankan usaha produktif berupa pembangunan proyek perumahan dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip Syariah serta dengan kewajiban bagi Nasabah untuk mengembalikan dana yang diterima berikut imbalan bagi Bank sesuai jangka waktu dan jadwal pengembalian yang disepakati.

b. Pembiayaan Pembelian Lahan BTN iB

Fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh Bank kepada badan usaha berbadan hukum untuk pengadaan tanah dan/atau pengolahan tanah untuk pembangunan rumah sederhana yang pembangunannya menggunakan fasilitas pembiayaan konstruksi BTN iB dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah serta dengan kewajiban bagi nasabah untuk mengembalikan dana yang diterima berikut imbalan (bagi hasil) bagi Bank sesuai jangka waktu dan jadwal pengembalian yang disepakati.

c. Pembiayaan Modal Kerja BTN iB

Fasilitas pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan dana Nasabah berdasarkan akad kerja sama dengan Bank untuk menjalankan suatu usaha kerja sama tertentu (*syirkah*) bersama dengan Nasabah yang menjalankan usaha produktif selain usaha pembangunan proyek perumahan dan dilaksanakan dengan akad berdasarkan prinsip syariah serta dengan kewajiban bagi Nasabah untuk mengembalikan dana yang diterima berikut imbalan bagi Bank sesuai jangka waktu dan jadwal pengembalian yang disepakati.

d. Pembiayaan Investasi BTN iB

Fasilitas pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan dana Nasabah berdasarkan akad kerja sama antara Bank untuk menjalankan suatu usaha kerja sama tertentu bersama dengan Nasabah yang menjalankan usaha produktif, guna pembelian/pengadaan barang-barang modal beserta jasa yang diperlukan untuk aktivitas usaha/investasi dan dilaksanakan dengan akad



berdasarkan prinsip Syariah serta dengan kewajiban bagi Nasabah untuk mengembalikan dana yang diterima berikut imbalan bagi Bank (bagi hasil atau *margin*) sesuai jangka waktu dan jadwal pengembalian yang disepakati.

- e. Pembiayaan BTN iB dengan Mekanisme IMBT
Penyediaan dana untuk pengadaan barang modal atau *refinancing* aset Nasabah dengan prinsip sewa beli antara pemilik objek IMBT (Bank/Lessor) dan penyewa (Nasabah/Lesse) dengan diakhiri opsi perpindahan kepemilikan objek IMBT dari Bank ke Nasabah melalui hibah atau jual beli sesuai kesepakatan.
- f. Pembiayaan Sindikasi BTN iB
Pembiayaan yang diberikan berupa sindikasi dan atau *Club Deal* oleh lebih dari satu Bank diberikan kepada satu nasabah yang jumlah pembiayaannya terlalu besar apabila diberikan oleh satu Lembaga keuangan Bank/Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) dengan pilihan akad "*Mudharabah*" (bagi hasil), "*Musyarakah*" (kerja sama), "*Murabahah*" (bagi hasil), atau "*Ijarah*" (sewa).

Produk Simpanan Syariah

1. Giro Syariah
 - a. Giro BTN iB
Produk simpanan dengan prinsip *wadiah* (titipan), untuk tujuan keperluan operasional keuangan nasabah dengan memberikan bonus yang menguntungkan bagi nasabah atas simpanannya guna memperlancar aktivitas bisnis.
 - b. Giro BTN Prima iB
Produk simpanan dengan prinsip *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah* (investasi), ditujukan untuk keperluan investasi. Nasabah akan mendapatkan bagi hasil yang menguntungkan guna memperlancar aktivitas bisnis.
2. Tabungan Syariah
 - a. Tabungan BTN Batara iB
Produk simpanan dana dengan akad *wadi'ah* (titipan), digunakan untuk keperluan transaksi perbankan sehari-hari dengan memberikan berbagai manfaat yang menguntungkan bagi nasabah dan pengenaan biaya administrasi yang tidak mengurangi pokok simpanan.
 - b. Tabungan BTN Prima iB
Produk simpanan dana berakad *mudharabah mutlaqah* dan *Mudharabah Muqayyadah* (investasi), ditujukan untuk keperluan Investasi dengan memberikan bagi hasil yang menguntungkan dan bersaing bagi nasabah dan biaya administrasi tanpa mengurangi pokok simpanan.
 - c. Tabungan BTN Haji iB dan Umroh iB
Produk simpanan yang ditujukan untuk mewujudkan niat ibadah Haji dan Umroh nasabah dengan akad "*Mudharabah*" (investasi) dengan memberikan bagi hasil yang menguntungkan dan kompetitif.

- d. TabunganKu iB
Produk simpanan dengan akad "*Wadiah*" (titipan), dengan memberikan bonus yang menarik. Diterbitkan secara bersama-sama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- e. Tabungan BTN Qurban iB
Produk simpanan yang ditujukan untuk mewujudkan niat ibadah qurban dengan akad "*Mudharabah Mutlaqah*" (bagi hasil), dengan memberikan bagi hasil yang menguntungkan dan kompetitif.
- f. Tabungan BTN Sempel iB
Tabungan Rupiah untuk Siswa yang diterbitkan Bersama oleh UUS Bank BTN dan Bank-Bank di Indonesia dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini.
- g. Tabungan BTN Emas iB
Produk tabungan dengan akad '*Mudharabah Muthlaqah*' yang digunakan untuk memberikan kemudahan nasabah dalam mempersiapkan dana untuk pembelian emas dan kebutuhan lain nasabah dimasa yang akan datang.

3. Deposito Syariah

- a. Deposito BTN iB
Sarana penyimpanan uang untuk investasi yang aman, nyaman dan terpercaya dalam jangka waktu tertentu, berdasarkan prinsip *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah* (investasi). Deposito ini dapat diberikan kepada perorangan maupun lembaga.
- b. Deposito On Call iB
Sarana penyimpanan uang untuk investasi yang aman dan terpercaya dalam jangka waktu yang lebih singkat, berdasarkan prinsip *mudharabah mutlaqah* (investasi). Deposito ini dapat diberikan kepada perorangan maupun lembaga.

Jasa dan Layanan

Jasa dan layanan perbankan yang dimiliki Perseroan di antaranya berupa kartu konsumen, jasa dan layanan pada bisnis *wealth management*, *electronic channel*, dan jasa perbankan lainnya. Jasa dan layanan yang ditawarkan oleh Kartu konsumen berupa kartu debit dan kartu kredit. *Wealth Management* melalui BTN Prioritas menyediakan layanan pengelolaan kekayaan untuk Nasabah terpilih. BTN Prioritas senantiasa menghadirkan inovasi-inovasi terbaru melalui variasi produk, *benefit* terbaik, *privilege*, serta layanan istimewa yang fokus pada solusi kebutuhan. BTN Prioritas juga berupaya meningkatkan kenyamanan dan kepuasan Nasabah melalui solusi produk dana, investasi dan proteksi yang beragam sesuai kebutuhan Nasabah serta layanan *Priority Service*, *Privilege* dan *Loyalty Program* melalui *loyalty platform* khusus yaitu PLUS by BTN Prioritas. Solusi produk dana, investasi dan proteksi yang bervariasi seperti:

- Produk Dana : Tabungan dan Deposito baik dalam mata uang Rupiah maupun Valuta Asing.
- Produk Investasi : Surat Berharga Negara, Reksa Dana dan layanan *Foreign Exchange* (FOREX).
- Produk Asuransi : *Bancassurance*

Selain itu, Nasabah BTN Prioritas akan mendapatkan *priority service* dari staf khusus yaitu Priority Banking Manager (PBM) berdedikasi dan telah tersertifikasi yang akan memberikan *advice* dalam pengelolaan dan pertumbuhan finansial secara eksklusif dengan pilihan produk finansial variatif.

Jasa *Electronic channel* terdiri dari produk ATM, CRM, BTN Mobile, *Internet Banking*, *Virtual Account*, EDC, QRIS, *Virtual Branch*, BTN Smart Residence, BTN Properti dan BTN Open API. Jasa yang ditawarkan oleh Korporasi berupa Bank Garansi BTN (Bank Garansi Lokal, SBLC, *Demand Guarantee* dan SKDB) dan SKBDN atau L/C. Sedangkan jasa dan layanan perbankan lainnya berupa jasa *trading*, jasa administrasi, jasa layanan, dan jasa lainnya.

Perbankan Konvensional

KARTU KONSUMER

a. Kartu Suka-suka BTN

Kartu Debit BTN dengan desain yang dapat disesuaikan dengan keinginan masing-masing nasabah atau komunitas yang dapat dipergunakan untuk transaksi belanja melalui EDC maupun debit online di berbagai *merchant online* di seluruh dunia.

b. Debit BTN Online (Visa dan GPN)

Adalah layanan yang diberikan kepada nasabah untuk dapat bertransaksi belanja *online* di berbagai *merchant* menggunakan Kartu Debit BTN Visa maupun GPN.

c. Kartu Blink BTN

Kartu BLINK BTN adalah Kartu BTN berbasis Uang Elektronik yang dapat digunakan untuk bertransaksi di ribuan akseptansi berlogo e-money antara lain: Tol, Moda Transportasi Trans Jakarta dan Kereta Commuterline, Perpustakaan dan lain sebagainya.

WEALTH MANAGEMENT

a. Layanan BTN Prioritas

Layanan BTN Prioritas merupakan layanan eksklusif dari Bank Tabungan Negara khusus Nasabah istimewa Bank BTN. Melalui *Customer Value Proposition* (CVP) BTN Prioritas yaitu *Defining Your Priority*, layanan BTN Prioritas hadir untuk memberikan solusi finansial dan layanan yang relevan, berkesinambungan dan berkepanjangan untuk setiap individu istimewa, Nasabah setia BTN Prioritas. Didukung oleh Priority Banking Manager yang profesional dan telah tersertifikasi, BTN Prioritas menghadirkan inovasi terbaru untuk memenuhi kebutuhan dan kenyamanan Nasabah melalui:

- Solusi produk yang bervariasi antara lain Produk Dana (Tabungan BTN Batara, Tabungan BTN Investa, Deposito BTN ritel Rupiah, Deposito BTN Ritel Valas, Tabungan Felas), Produk Investasi (Surat Berharga Negara,

Reksa Dana, Layanan *Foreign Exchange*) dan Produk *Bancassurance*.

- *Service Privilege* berupa *Dedicated Priority Banking Manager*, *E-Consolidated Statement*, Layanan *E-Channel*, *Welcoming Pack*, *Meeting Room*, *Calendar Event*, Majalah BTN Prioritas GoodLiving, BTN Prioritas Concierge Service, *Exclusive Medical Check Up*, Hadiah Hari Istimewa dan *Loyalty Reward* yang dapat ditukarkan melalui PLUS by BTN Prioritas, *Airport Lounge*, *Airport Handling*, *Airport Transfer* Domestik dan Internasional, Konsultasi Pendidikan ke Luar Negeri, dan Konsultasi Pajak.
- *Product Privilege* berupa Kartu Debit BTN Prioritas Visa Platinum dengan desain khusus yang dapat digunakan di berbagai *merchant* pilihan untuk mendapatkan penawaran spesial, *Safe Deposit Box* (SDB), BTN Mobile, Program Spesial Penempatan Dana dan *Member Get Member*, Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) khusus Nasabah BTN Prioritas.

b. PLUS by BTN Prioritas

Memahami kebutuhan dan keunikan Nasabah adalah pilar penting bagi Bank BTN untuk memberikan serta meningkatkan layanan perbankan terbaik melalui fasilitas, produk dan layanan unggulannya. Berangkat dari visi tersebut, BTN Prioritas menghadirkan layanan PLUS (*Platform Loyalty User*). PLUS by BTN Prioritas adalah sebuah layanan berbasis *website* dengan konsep *membership* yang dihadirkan khusus untuk Nasabah BTN Prioritas. Keberadaan PLUS by BTN Prioritas merupakan upaya untuk menterjemahkan *customer value proposition Defining Your Priority* sehingga dapat dengan nyata dinikmati manfaatnya oleh Nasabah.

PLUS by BTN Prioritas dapat diakses melalui www.definingyourpriority.com dan menawarkan berbagai keuntungan bagi Nasabah BTN Prioritas sesuai level *membership* Nasabah berdasarkan total dana kelolaan Nasabah (*Asset Under Management/AUM*) yang ditempatkan di BTN Prioritas.

Berikut adalah level *membership* Nasabah BTN Prioritas:

- Gold : total dana kelolaan mulai Rp500 juta hingga <Rp2 Miliar
- Platinum : total dana kelolaan mulai Rp2 Miliar hingga <Rp5 Miliar
- Titanium : total dana kelolaan mulai Rp5 Miliar hingga <Rp10 Miliar
- Prime : total dana kelolaan mulai Rp10 Miliar

Melalui PLUS by BTN Prioritas, Nasabah dapat melakukan penukaran benefit dan privilege di 6 (enam) fitur utama yaitu:

- *Special Offers*: *Cashback* Pembuatan *Single Investor ID* (SID), Penempatan Dana dengan *Special Benefit*.
- Pilihan *Loyalty Reward*: sebagai bentuk apresiasi kami untuk nasabah loyal, kami hadirkan berbagai variasi pilihan hadiah mulai dari *Gadget* dan *Electronics*, Aksesoris Gadget, Headphone dan Audio, Jam Tangan, Elektronik Rumah Tangga, Paket Data, *E-Voucher*,

Perlengkapan Rumah Tangga, Games dan Hobby, Health dan Beauty hingga Hampers dan Cake.

- *Banking Privilege*: Safe Deposit Box, Bebas Biaya Transaksi *Mobile Banking*, Konsultasi Pajak, Konsultasi Pendidikan ke Luar Negeri, *Meeting Room Reservation*.
- *BTN Prioritas Concierge Service*: *Airport Lounge*, *Airport Handling*, *Airport Transfer* Domestik dan Internasional, *Medical Check Up*.
- *Kupon Membership*: untuk Anda yang secara rutin menikmati hobi olahraga seperti Golf hingga membership hotel dan restoran pilihan.
- *Hadiah Hari Istimewa*: untuk melengkapi hari istimewa Anda, tersedia dalam berbagai variasi hadiah mulai dari *Gadget* dan *Electronics*, Aksesori *Gadget*, *Headphone* dan Audio, Jam Tangan, Elektronik Rumah Tangga, Paket Data, *E-Voucher*, Perlengkapan Rumah Tangga, *Games* dan *Hobby*, *Health* dan *Beauty* hingga *Hampers* dan *Cake*.

Salah satu pengembangan di PLUS by BTN Prioritas adalah *BTN Prioritas* menjadi Bank pertama yang memberikan layanan *airport lounge* tanpa perlu menggunakan Kartu Debit tetapi hanya dengan menunjukkan kode *booking* atau *scan QR*. Dengan metode ini Nasabah *BTN Prioritas* bisa masuk ke dalam *airport lounge* dalam waktu kurang dari 60 detik saja. Fitur ini saat ini adalah *the first in the market* di segmentasi *Priority Banking*.

PLUS by *BTN Prioritas* juga berhasil menyabet penghargaan internasional bertajuk "*Wealth Management Platform of The Year*" di *Retail Banking Awards 2023* yang diselenggarakan oleh *Asian Banking and Finance*, sebuah majalah bisnis dan keuangan bergengsi yang berbasis di Singapura. Layanan PLUS dari *BTN Prioritas* meraih penghargaan tersebut karena dinilai memenuhi kriteria penilaian yaitu *uniqueness & innovation, effectiveness & impact* serta *dynamism*.

Sejak Januari hingga 31 Desember 2023, terdapat 27.088 transaksi penukaran yang dilakukan Nasabah di PLUS by *BTN Prioritas*. Sementara itu jumlah Nasabah yang melakukan penukaran telah mencapai 47% dari total Nasabah qualified *BTN Prioritas*.

ATM

Layanan *Automatic Teller Machine (ATM)* yang dapat melayani penarikan tunai dengan denominasi Rp50.000 dan Rp100.000 yang tersebar di seluruh wilayah Kantor Cabang Perseroan dan lokasi-lokasi premium seperti *Gallery ATM* di Mall, pusat perbelanjaan, perkantoran, pasar dan perumahan sehingga makin memudahkan bagi nasabah dalam bertransaksi serta didukung jaringan yang *online 24 jam*.

CASH RECYCLING MACHINE (CRM)

Layanan mesin ATM yang dapat menerima setoran tunai dan tarik tunai dengan denominasi uang Rp50.000 dan Rp100.000

dan dapat melayani transaksi perbankan lainnya dengan cepat dan *real time*.

BTN MOBILE

BTN Mobile berfungsi sebagai solusi perbankan dengan konsep *superapp* yang praktis, aman, dan nyaman. Dengan menggunakan *gadget*, nasabah dapat dengan mudahnya melakukan berbagai layanan perbankan secara *realtime* di manapun dan kapanpun.

INTERNET BANKING

Layanan perbankan bagi nasabah perorangan untuk dapat memperoleh informasi keuangan dan melakukan swakelola transaksi perbankan melalui media internet via website: <https://internetbanking.btn.co.id> dengan mendaftarkan diri melalui mesin ATM *BTN* atau menghubungi *Customer Service* Kantor Cabang Bank *BTN* (tarif data internet mengikuti kebijakan masing-masing operator penyedia jaringan).

VIRTUAL ACCOUNT

Layanan nomor identifikasi dari pelanggan suatu perusahaan (*end user*) yang telah bekerja sama dengan Perseroan baik untuk pelanggan perorangan maupun non perorangan sebagai identifikasi penerimaan dana.

ELECTRONIC DATA CAPTURE (EDC)

Layanan selayaknya mesin ATM mini yang berfungsi sebagai sarana penyedia transaksi dan alat pembayaran yang penggunaannya dengan cara memasukkan kartu atau menggesek (*swipe*) kartu ATM (Kartu Debit atau Kredit) dalam suatu bank atau antar bank serta dilengkapi fasilitas pembayaran lainnya yang terkoneksi secara *realtime online*.

BTN CASH MANAGEMENT

Layanan khusus bagi nasabah lembaga untuk melakukan swakelola transaksi perbankan melalui koneksi internet. Alamat website: <https://cashmanagement.btn.co.id> dengan melakukan pendaftaran ke Kantor Cabang Bank *BTN* terdekat. Tarif data internet mengikuti kebijakan masing-masing operator.

BRANCHLESS BANKING

Layanan produk dan jasa perbankan tanpa kantor melalui kerja sama keagenan Bank dan Kantor Pos yang bertindak untuk dan atas nama Bank dalam rangka memperluas jangkauan dan kemudahan layanan transaksi perbankan bagi masyarakat serta didukung sarana jaringan teknologi informasi.

QUICK RESPONSE CODE INDONESIAN STANDARD (QRIS)

Standarisasi pembayaran menggunakan metode *QR Code* dari Bank Indonesia agar proses transaksi dengan *QR Code* menjadi lebih mudah, cepat, dan terjaga keamanannya.

VIRTUAL BRANCH

BTN Virtual Branch membawa kemudahan baru bagi Nasabah Bank *BTN*. Nasabah tidak perlu berlama-lama di *Outlet* Bank *BTN* untuk melakukan transaksi di *Teller* dan *Customer Service*,

cukup melakukan pengisian *e-form* secara *online* dimana saja dan dari mana saja sebelum melakukan transaksi di *Outlet* Bank BTN.

BTN SMART RESIDENCE

BTN Smart Residence merupakan suatu platform milik Bank BTN yang digunakan sebagai penghubung antara penghuni dan pengelola dalam proses pembayaran tagihan, iuran, pertukaran informasi sampai dengan keluhan atau pengaduan.

BTN PROPERTI

Layanan khusus berbasis portal properti yang memudahkan calon debitur dalam hal pencarian *listing* proyek yang telah bekerja sama dengan Bank BTN, simulasi angsuran, pengajuan KPR/KPA secara *online*, *online live chat* 24 jam, serta fitur-fitur lainnya. BTN Properti juga melengkapi fiturnya dengan teknologi *4D Tour Service* yang memungkinkan calon debitur mendapatkan gambaran *real* terhadap unit properti yang dipilih.

BTN OPEN API

API atau *Application Programming Interface*, merupakan penghubung antara satu aplikasi dengan aplikasi lainnya. Teknologi tersebut yang memungkinkan nasabah mitra dapat melakukan transfer menggunakan aplikasinya sendiri karena aplikasi tersebut terhubung dengan sistem BTN melalui API.

JASA DAN LAYANAN PERBANKAN LAINNYA

Selain menyalurkan kredit dan menghimpun dana pihak ketiga, Perseroan juga menyediakan layanan konsumen lainnya untuk meningkatkan *Fee Based Income*, seperti pengiriman uang dalam dan luar negeri, Penukaran uang valuta asing, Kotak penyimpanan (*safe deposit box*), Pembayaran tagihan (telepon, listrik dan air), Pembayaran internet dan TV berlangganan, pembelian tiket penerbangan dan tiket kereta api, serta Isi ulang pulsa. Selain itu, sebagai penyedia solusi total perbankan kepada nasabah lembaga, Perseroan menyediakan berbagai jasa dan layanan bagi nasabah lembaga antara lain:

a. Virtual Account BTN

Layanan bagi nasabah Giro Lembaga BTN berupa *account virtual* yang dapat digunakan oleh pelanggan/mitra dari nasabah lembaga tersebut untuk melakukan pembayaran tagihan menggunakan kartu bank manapun dan nasabah lembaga dapat melakukan monitoring penerimaan pembayaran secara *online real time* terhadap hasil pembayaran pelanggannya.

b. Transfer Management

Transfer Management merupakan layanan bank kepada nasabah Lembaga untuk membantu nasabah melakukan transfer dana lembaga secara *online*, baik *Inhouse Transfer* (antar rekening), *Domestic transfer* (LLG/Clearing dan RTGS), dan *International Fund Transfer* (transfer ke bank lain baik di dalam maupun luar negeri dalam mata uang asing). Transfer dapat dilakukan dalam *single currency* (kode mata uang yang dikirim sama dengan kode mata uang yang diterima), dan *multi currency* (kode mata uang yang dikirim tidak sama dengan kode mata uang yang diterima).

c. Payment Management

Payment management merupakan bentuk kerja sama bank dengan nasabah untuk membantu nasabah mengelola pembayaran dan tagihan seperti;

- *Edu Payment/SPP Online* BTN
- *Edu Payment* merupakan layanan bagi lembaga pendidikan berupa penerimaan setoran biaya pendidikan dan biaya lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan secara *online real time*.
- *Bill Payment* (Pembayaran tagihan telepon, listrik, air, gas dan lainnya).
 - Pembayaran Pajak
 - Pembayaran pembelian produk Pertamina
 - Pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan
 - Pembayaran iuran BPJS Kesehatan
 - Pembayaran Pensiun (Taspen dan ASABRI)
 - Pembayaran Tagihan Rumah Sakit
 - Bank Operasional I dan II

d. Payroll Service BTN

Payroll Service merupakan jasa layanan Bank kepada Perusahaan/Lembaga dalam mengelola pembayaran gaji atau honor serta kebutuhan finansial lainnya.

e. Poin Spekta

Poin Spekta BTN adalah Program *loyalty* yang diberikan kepada nasabah Bank BTN berbentuk poin yang dapat ditukarkan atau di-*redeem* dengan berbagai macam voucher dan hadiah langsung.

Perbankan Syariah/Unit Usaha Syariah

1. Kartu Debit Visa BTN Syariah

Fasilitas layanan kartu yang memberikan kemudahan bagi nasabah melalui ATM seperti tarik tunai dan transfer, dapat dilakukan di seluruh jaringan ATM Bank BTN, Link, ATM Bersama, Prima, Visa dan Plus serta berbelanja di toko-toko berlogo Visa di dalam dan luar negeri.

2. Kirim Uang

Fasilitas layanan pengiriman uang secara *real time* ke sesama rekening Bank BTN dan BTN Syariah serta pengiriman uang ke Bank lain menggunakan fasilitas SKN, RTGS, Link, ATM Bersama dan Prima.

3. BTN Cash Management

Layanan berbasis internet dengan menggunakan aplikasi *web-browser* yang berguna untuk membantu nasabah dalam mengelola kegiatan perbankan secara mandiri, efektif dan efisien.

4. Payment Point BTN iB

Fasilitas layanan bagi nasabah untuk memudahkan dalam membayar tagihan rutin dan tetap seperti tagihan pembayaran uang pendidikan.

5. Payroll BTN iB

Layanan bagi perusahaan, lembaga atau perorangan dalam mengelola pembayaran gaji, THR, bonus dan kebutuhan finansial lainnya yang bersifat rutin bagi karyawan.



6. **Penerimaan Biaya Perjalanan Haji**
Fasilitas yang memberikan kepastian dan kemudahan untuk mendapatkan porsi keberangkatan ibadah haji dengan sistem *online* dari Siskohat.
7. **SPP Online BTN iB**
Layanan bagi Perguruan Tinggi/Sekolah dalam menyediakan *delivery channel* menerima setoran biaya-biaya pendidikan secara *realtime* dan *online*.
8. **Program Pengembangan Operasional BTN iB**
Program yang diberikan oleh Bank kepada Nasabah lembaga dalam bentuk dana, barang, maupun fasilitas lainnya untuk mendukung kelancaran operasional Nasabah dengan persyaratan tertentu yang disepakati Bank dan Nasabah dengan tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian dan Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance* (GCG).
9. **Garansi Bank BTN iB**
Jasa yang diberikan oleh Bank berupa jaminan pembayaran sejumlah uang tertentu yang diberikan kepada pihak yang menerima jaminan untuk suatu kepentingan transaksi/proyek tertentu yang akan dijalankan Nasabah dengan akad "*Kafalah*" (Garansi).
10. **Safe Deposit Box BTN iB**
Tempat dalam bentuk Boks yang dirancang khusus dengan ukuran tertentu dan dilengkapi system pengamanan untuk menjamin keamanan barang berharga atau dokumen penting yang disimpan dari bahaya kebakaran, perampokan, dan lainnya. Akad yang digunakan adalah "*Ijarah*" (Sewa).
11. **Mobile Banking**
Aplikasi perbankan bagi nasabah BTN Syariah untuk memudahkan transaksi pembelian, pembayaran, transfer dan akses informasi rekening dari perangkat seluler.
12. **Virtual Account**
Layanan yang memberikan kemudahan pembayaran dengan memberikan nomor identifikasi pembayaran.



Daftar Keanggotaan Asosiasi

Pentingnya peran organisasi maupun asosiasi bagi suatu perusahaan mendorong Perseroan untuk ikut serta aktif dalam keanggotaan organisasi atau asosiasi terutama di Indonesia. Perseroan bergabung dengan berbagai asosiasi/perhimpunan yang sesuai dengan kiprahnya dalam industri perbankan, termasuk dalam statusnya sebagai BUMN. Dengan bergabung di dalam asosiasi/perhimpunan ini, Perseroan bisa berbagi isu dan kebijakan tentang industri perbankan, termasuk dampak dan peluangnya bagi perbankan pada jangka pendek, menengah maupun panjang. Selama tahun 2023, Perseroan bergabung dengan asosiasi/perhimpunan berikut:

Nama Asosiasi	Kedudukan dalam Asosiasi
NASIONAL	
Ikatan Bankir Indonesia (IBI)	Ketua Bidang Kewilayahan dan Anggota Bidang Kewilayahan
Perhimpunan Bank-Bank Umum Nasional (PERBANAS)	Bendahara dan Anggota Bidang Pengembangan Kajian Ekonomi Perbankan
Forum Human Capital Indonesia BUMN	Anggota
Himpunan Bank-Bank Milik Negara (HIMBARA)	Anggota
Forum Humas BUMN	Anggota
Asosiasi Emiten Indonesia	Anggota
Konsorsium Data Kerugian Eksternal (KDKE)	Anggota
Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI)	Anggota
Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP)	Anggota
Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI)	Anggota
Ikatan Auditor Intern Bank	Anggota
Perhimpunan Audit Internal Indonesia	Anggota
Forum Hukum BUMN	Anggota
Asosiasi SWIFT Indonesia (ASWIFTINDO)	Anggota
Forum Komunikasi Direktur Operasional	Anggota
SRIKANDI BUMN	Anggota
Perhimpunan Pedagang Surat Utang Negara (HIMDASUN)	Anggota
Asosiasi Wali Amanat Indonesia	Anggota
INTERNASIONAL	
Association Cambiste Internationale (ACI) - Financial Markets Association (FMA)	Bendahara Umum
World Saving Bank Institution (WSBI)	Anggota Asia - Pacific Regional Group
The Institute of Internal Auditor (IIA)-Indonesia Chapter	Anggota
United Nations Environment Programme Finance Initiative (UNEP FI)	Anggota

Wilayah Operasional

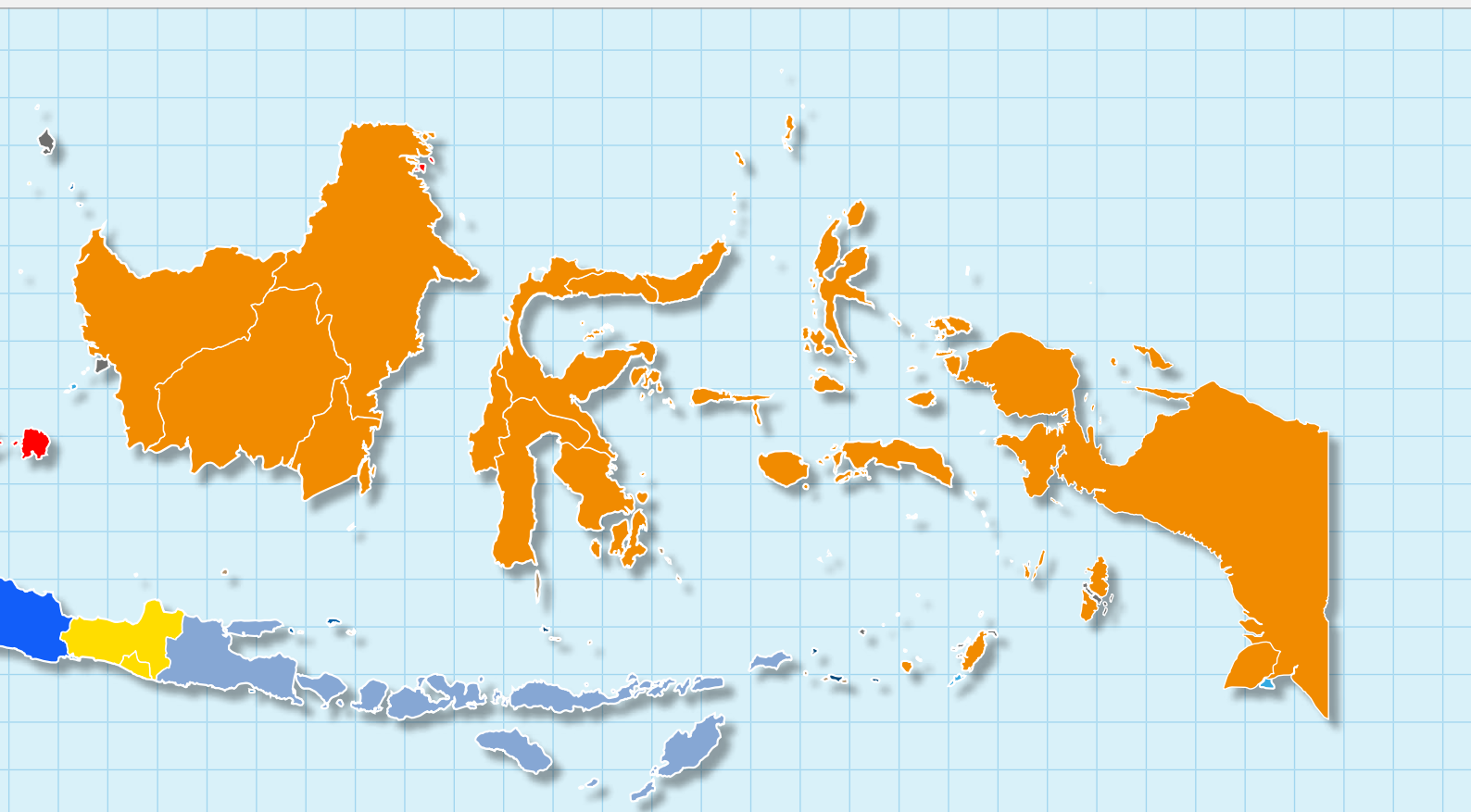
Tabel Jaringan Kantor Tahun selama 5 tahun Terakhir

Jenis Kantor	2023	2022	2021	2020	2019
Kantor Wilayah	6	6	6	6	6
Kantor Cabang	81	80	79	78	78
Kantor Cabang Pembantu	541	537	543	314	326
Kantor Kas	-	-	-	247	358
Payment Point	-	-	-	56	52
Kantor Fungsional	3	3	58*	-	-
Kantor Layanan Setara KCP	-	2	2	2	3
Mobil Kas Keliling	-	-	51	23	23
Total Jaringan Kantor Konvensional	631	628	739	726	846
Kantor Cabang Syariah	34	30	29	25	25
Kantor Cabang Pembantu Syariah	75	69	61	59	53
Kantor Kas Syariah	-	5	7	7	7
Payment Point Syariah	-	6	12	12	12
Mobil Kas Keliling	-	-	-	-	-
Total Jaringan Kantor Syariah	109	110	109	103	99

*) Memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2021 tanggal 30 Juli 2021 tentang Bank Umum, terdapat penyederhanaan pencatatan jaringan kepada Regulator OJK yaitu Kantor Bank yang berada di bawah Kantor Cabang hanya Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Fungsional sehingga terdapat penyetaraan status Kantor Kas menjadi Kantor Cabang Pembantu.



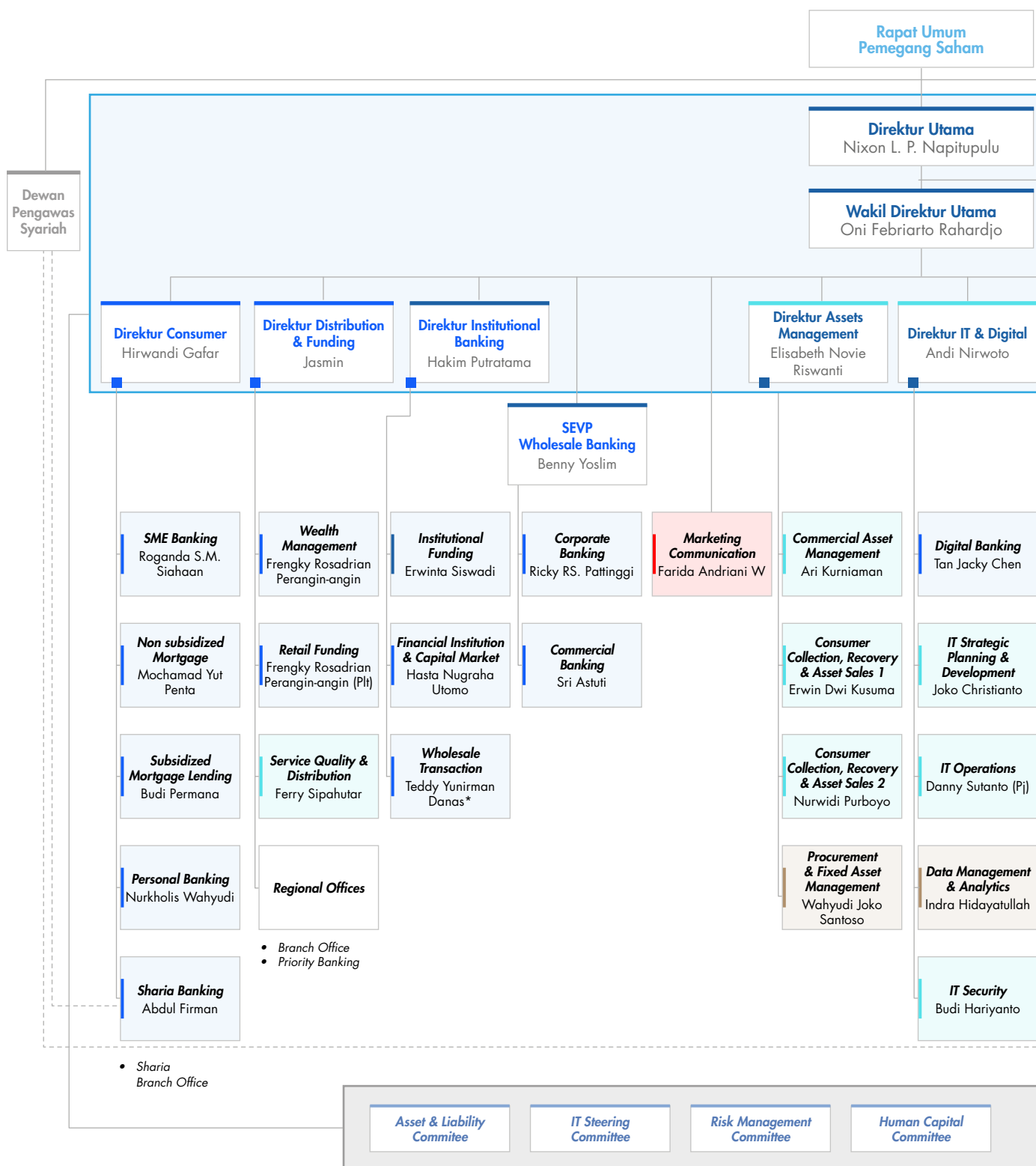
	Kantor Wilayah I (Jawa Barat)	Kantor Wilayah II (DKI Jakarta & Banten)	Kantor Wilayah III (Jawa Timur, Bali & Nusa Tenggara)
Kantor Wilayah	1	1	1
Kantor Cabang	15	13	16
Kantor Cabang Pembantu	125	131	83
Kantor Fungsional	-	-	-
Kantor Cabang Syariah	7	4	4
Kantor Cabang Pembantu Syariah	14	11	13
Kantor Kas Syariah	-	-	-
Payment Point Syariah	-	-	-
Outlet & Lounge BTN Prioritas	9	17	8
ATM & CRM	527	469	342



	Kantor Wilayah IV (Sumatera)	Kantor Wilayah V (Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua)	Kantor Wilayah VI (Jawa Tengah & DIY)
Kantor Wilayah	1	1	1
Kantor Cabang	11	18	8
Kantor Cabang Pembantu	76	70	56
Kantor Fungsional	1	-	2
Kantor Cabang Syariah	9	6	4
Kantor Cabang Pembantu Syariah	18	5	14
Kantor Kas Syariah	-	-	-
Payment Point Syariah	-	-	-
Outlet & Lounge BTN Prioritas	8	10	5
ATM & CRM	305	294	213



Struktur Organisasi

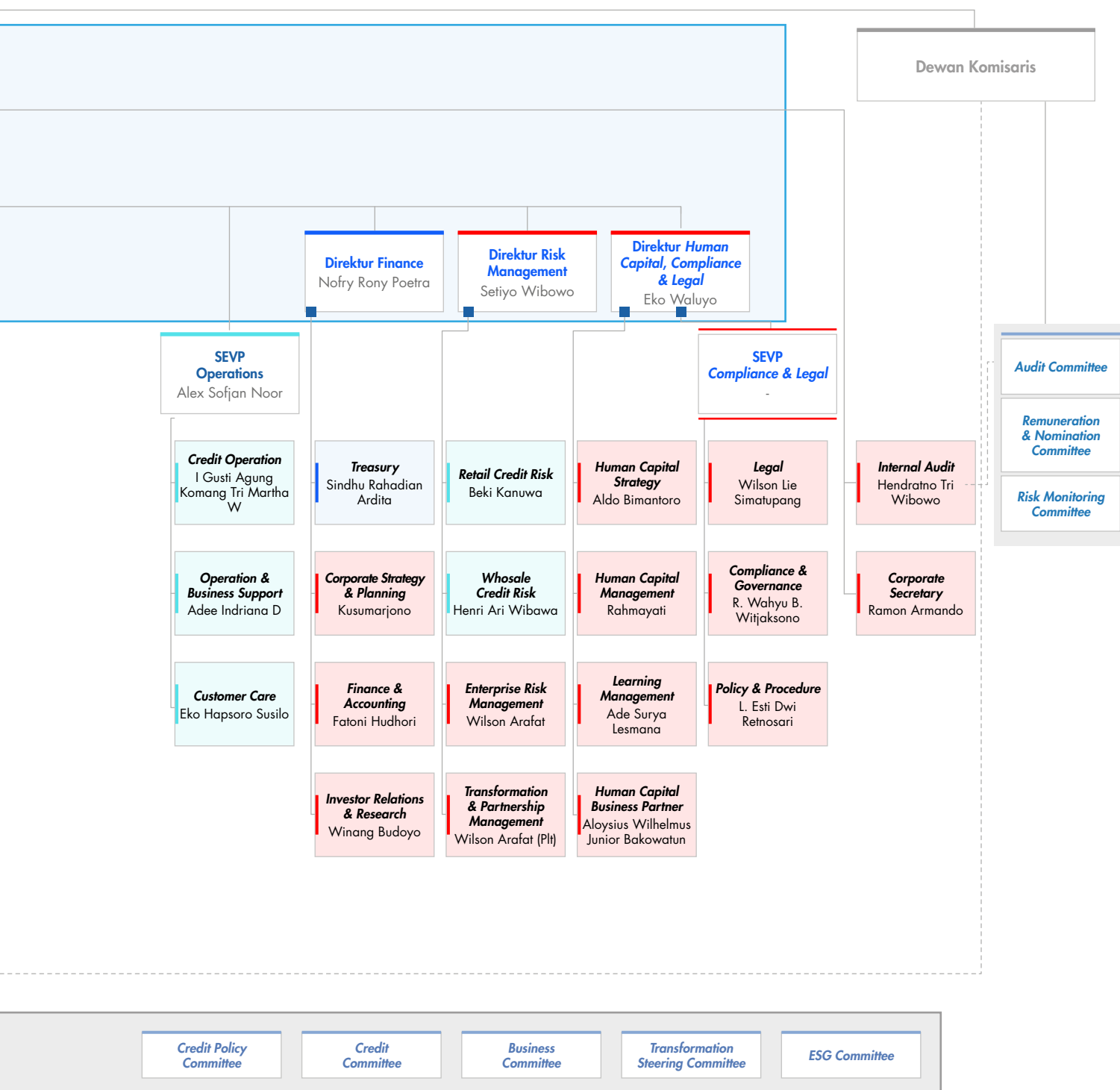


Committee Board Business Support Shared Service

— Garis Komando - - - - Garis Koordinasi

*) Berhenti menjabat terhitung sejak tanggal 20 Desember 2023

Sejalan dengan transformasi bisnis yang telah dilakukan Perseroan, maka Direksi telah melakukan penyesuaian terhadap struktur organisasi agar proses eksekusi inisiatif bisnis dan operasional dapat berjalan efektif melalui Surat Persetujuan Komisaris No. 131/KOM/BTN/XI/2023 tentang Persetujuan Perubahan Struktur Organisasi Kantor Pusat Bank BTN tanggal 01 November 2023. Berikut adalah Struktur Organisasi Perseroan Per 31 Desember 2023.



Anggota Komite di Bawah Dewan Komisaris per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

1. Komite Audit: Iqbal Latanro (Ketua merangkap anggota), Sentot A. Sentausa, Andin Hadiyanto, Endang A. Suprijatna, dan Peter Eko Budi Darwito.
2. Komite Remunerasi dan Nominasi: Chandra M. Hamzah (Ketua merangkap anggota), Iqbal Latanro, Armand B. Arief, Sentot A. Sentausa, Andin Hadiyanto,

Herry Trisaputra Zuna, Himawan Arief Sugoto, Mohamad Yusuf Permana, Moch Amin Nurdin, dan Rahmayati.

3. Komite Pemantau Risiko: Armand B. Arief (Ketua merangkap anggota), Herry Trisaputra Zuna, Himawan Arief Sugoto, Ignace Widiatmoko, dan Pamuji Gesang Raharjo.

Nama Komite di Bawah Direksi terdapat pada Bab Tata Kelola Perusahaan.



Profil Direksi



NIXON L. P. NAPITUPULU

Direktur Utama



Warga Negara Indonesia, berusia 54 Tahun Per Desember 2023, berdomisili di Jakarta Selatan.



Riwayat Pendidikan

Sarjana (S1) Ekonomi, Universitas Sumatera Utara, Medan (1994).



Sertifikasi

- Manajemen Risiko Level 5 oleh BSMR (*Refreshment* 2022).
- Treasury Dealer Level Advance oleh LSPP (2023).



Pengalaman Kerja

- Direktur Utama Bank BTN (Maret 2023 – saat ini).
- Wakil Direktur Utama Bank BTN (Maret 2021 – Maret 2023).
- Plt. Direktur Utama Bank BTN (Desember 2020-Maret 2021).
- Direktur Finance, Planning, and Treasury Bank BTN (November 2019-Maret 2021).
- Direktur Finance, Treasury, and Strategy Bank BTN (Agustus 2019 – November 2019).
- Direktur Collection and Asset Management merangkap Plt. Direktur Finance, Treasury, and Strategy Bank BTN (Mei 2019 – Agustus 2019).
- Direktur Collection and Asset Management Bank BTN (Maret 2018 – Mei 2019).
- Direktur Collection, Asset Management, and Legal Bank BTN (2017-Mei 2019). (Desember 2017 – Maret 2018).
- Direktur Bank BTN (Maret 2017 – Desember 2017).
- Direktur Utama PT Bank Mandiri Taspen Pos (2015- Maret 2017).
- Head of Tim Transisi Bank Joint Venture PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2015).
- Head of Priority Project Bank Joint Venture PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2014-2015).
- Group Head Corporate Secretary Group PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2013-2014).



Dasar Hukum Pengangkatan

Menjabat sebagai Direktur Perseroan untuk pertama kalinya sejak 17 Maret 2017 melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Perseroan dan dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 25 Juli 2017. Menjabat sebagai Wakil Direktur Utama sejak 10 Maret 2021 melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Perseroan dan dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tanggal 19 Mei 2021 dan dipercaya untuk menjabat kembali pada periode ke-2 sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan berdasarkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Perseroan pada tanggal 02 Maret 2022. Kemudian menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tanggal 16 Maret 2023 melalui Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Perseroan dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan sesuai dengan pengangkatan berdasarkan Keputusan RUPST Tahun Buku 2021 tanggal 2 Maret 2022 dan dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tanggal 7 Juni 2023.



Periode Menjabat

- 17 Maret 2017 – 02 Maret 2022, Periode Pertama
- 02 Maret 2022 – RUPS Tahun 2027, Periode Kedua.



Jabatan Rangkap

- Ketua merangkap Anggota Tetap Komite Aset dan Liabilitas Bank BTN
- Anggota Tetap Komite Pengarah Teknologi Informasi Bank BTN
- Ketua merangkap Anggota Tetap Komite Manajemen Risiko Bank BTN
- Anggota Tetap Komite Human Capital Bank BTN
- Anggota Tetap Komite Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank BTN
- Anggota Tetap RKK Komite A Fungsi Risiko Bank BTN
- Ketua merangkap Anggota Tetap Komite Bisnis Bank BTN
- Ketua merangkap Anggota Tetap Komite ESG Bank BTN

Periode jabatan sebagai Komite mengikuti Periode Jabatan sebagai Direktur Utama.



Jabatan Rangkap Jabatan Rangkap pada Perusahaan Terbuka Lain

Tidak memiliki rangkap jabatan pada perusahaan terbuka lain.



Kepemilikan Saham BBTN

Per 31 Desember 2023, memiliki 4.250.500 lembar saham/0,0302862%



ONI FEBRIARTO RAHARDJO

Wakil Direktur Utama



Warga Negara Indonesia, berusia 52 Tahun Per Desember 2023, berdomisili di Tangerang Selatan.



Riwayat Pendidikan

- Sarjana (S1) Teknik, Universitas Diponegoro, Semarang (1994).
- Master (S2) Manajemen, Sekolah Tinggi Manajemen PPM, Jakarta (1997).



Sertifikasi

- Manajemen Risiko Level 5 oleh LSPP (*Refreshment* 2023).



Pengalaman Kerja

- Wakil Direktur Utama Bank BTN (Maret 2023 – saat ini).
- Wakil Direktur Utama Perum Perumnas (Mei 2020 – Maret 2023).
- Plt. Direktur Utama Bank BTN (Agustus 2019 - November 2019).
- Direktur Commercial Banking Bank BTN (Maret 2015 - Agustus 2019).



Dasar Hukum Pengangkatan

Menjabat sebagai Direktur Perseroan untuk pertama kalinya sejak 24 Maret 2015 melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Perseroan dan dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 19 Mei 2015. Selanjutnya menjabat sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan sejak 16 Maret 2023 melalui Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Perseroan dan dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 07 Juni 2023.



Periode Menjabat

- 24 Maret 2015 – 27 November 2019, Periode Pertama
- 16 Maret 2023 – RUPS Tahunan 2028, Periode Kedua.



Jabatan Rangkap

- Anggota Tetap Komite Aset dan Liabilitas Bank BTN
- Anggota Tetap Komite Pengarah Teknologi Informasi Bank BTN
- Anggota Tetap Komite Human Capital Bank BTN
- Anggota Tetap Komite Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank BTN
- Anggota Tetap RKK Komite A Fungsi Bisnis Bank BTN
- Anggota Tetap Komite ESG Bank BTN

Periode jabatan sebagai Komite mengikuti Periode Jabatan sebagai Wakil Direktur Utama.



Jabatan Rangkap pada Perusahaan Terbuka Lain

Tidak memiliki rangkap jabatan pada perusahaan terbuka lain.



Kepemilikan Saham BBTN

Per 31 Desember 2023, memiliki 308.000 lembar saham/0,0021946%



HIRWANDI GAFAR

Direktur Consumer



Warga Negara Indonesia, berusia 55 Tahun Per Desember 2023, berdomisili di Jakarta Barat.



Riwayat Pendidikan

Sarjana (S1) Teknik Sipil, Institut Teknologi Bandung, Bandung (1992).



Sertifikasi

- Manajemen Risiko Level 5 oleh LSPP (Refreshment 2022).
- International Risk Management Refreshment & Wealth Management Certification Program oleh MMUGM dan IBI (2022).
- Pelatihan Dasar Perbankan Syariah/PDPS oleh PEBS (2020).



Pengalaman Kerja

- Direktur Consumer Bank BTN (Maret 2022 – saat ini).
- Direktur Unit Usaha Syariah Bank BTN (2020 – saat ini).
- Direktur Consumer and Commercial Lending Bank BTN (2019 - Maret 2022).
- Commercial Lending Division Head Bank BTN (2019).
- Subsidized Mortgage Lending Division Head Bank BTN (2019).



Dasar Hukum Pengangkatan

Menjabat sebagai Direktur Perseroan untuk pertama kalinya sejak 27 November 2019 melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan dan dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 28 Agustus 2020.



Periode Menjabat

27 November 2019 - RUPS Tahun 2024, Periode Pertama.



Jabatan Rangkap

- Anggota Tetap Komite Aset dan Liabilitas Bank BTN
- Anggota Tetap Komite Manajemen Risiko Bank BTN
- Anggota Tetap Komite Human Capital Bank BTN
- Anggota Tetap Komite Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank BTN
- Anggota Tetap RKK Komite A Fungsi Bisnis Bank BTN
- Anggota Tetap Komite Bisnis Bank BTN

Periode jabatan sebagai Komite mengikuti Periode Jabatan sebagai Direktur Consumer.



Jabatan Rangkap pada Perusahaan Terbuka Lain

Tidak memiliki rangkap pada perusahaan lain atau pada institusi lain.



Kepemilikan Saham BBTN

Per 31 Desember 2023, memiliki 1.763.314 lembar saham/0,0125642%



NOFRY RONY POETRA

Direktur Finance



Warga Negara Indonesia, berusia 55 Tahun Per Desember 2023, berdomisili di Jakarta Timur.



Riwayat Pendidikan

- Sarjana (S1) Ekonomi, Universitas Pancasila, Jakarta (1991).
- Master (S2) MBA Business, The George Washington University, Washington DC, USA (1999).



Sertifikasi

- Treasury Dealer Level Advance (ACI/LSPP) (*Refreshment* 2021).
- Manajemen Risiko Perbankan Level 5 oleh LSPP (*Refreshment* 2023).
- Certified Wealth Manager (CWM) (2006).



Pengalaman Kerja

- Direktur Finance Bank BTN (Maret 2022 – saat ini).
- Direktur Finance, Planning and Treasury Bank BTN (2021- Maret 2022).
- Treasury Division Head Bank BTN (2015 - 2021).
- Pjs. Kepala Kantor Wilayah I Bank BTN (2015).
- Treasury Division Head Bank BTN (2014)..



Dasar Hukum Pengangkatan

Menjabat sebagai Direktur Perseroan untuk pertama kalinya sejak 10 Maret 2021 melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Perseroan dan dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tanggal 09 Agustus 2021.



Periode Menjabat

10 Maret 2021 – RUPS Tahun 2026, Periode Pertama.



Jabatan Rangkap

- Anggota Tetap Komite Aset dan Liabilitas Bank BTN
- Anggota Tetap Komite Pengarah Teknologi Informasi Bank BTN
- Anggota Tetap Komite Manajemen Risiko Bank BTN
- Anggota Tetap Komite Human Capital Bank BTN
- Anggota Tetap Komite Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank BTN
- Anggota Tetap RKK Komite A Fungsi Bisnis Bank BTN
- Anggota Tetap Komite ESG Bank BTN

Periode jabatan sebagai Komite mengikuti Periode Jabatan sebagai Direktur Finance.



Jabatan Rangkap pada Perusahaan Terbuka Lain

Tidak memiliki rangkap pada perusahaan lain atau pada institusi lain.



Kepemilikan Saham BBTN

Per 31 Desember 2023, memiliki 2.531.022 lembar saham/0,0180344%



EKO WALUYO

Direktur Human Capital, Compliance and Legal



Warga Negara Indonesia, berusia 52 Tahun Per Desember 2023, berdomisili di Bekasi.



Riwayat Pendidikan

- Sarjana (S1) Ekonomi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1995).
- Magister (S2) Manajemen, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta/Gatton College of Business, MBA Short Course Program in Cooperation with MM UGM, University of Kentucky, USA (2004).



Sertifikasi

- Manajemen Risiko Perbankan Level 5 oleh LSPP (*Refreshment* 2023).
- Certified Anti Fraud Professional oleh Asia Anti Fraud (2023)



Pengalaman Kerja

- Direktur Human Capital, Compliance and Legal Bank BTN (Maret 2022 – saat ini).
- Direktur Compliance and Legal Bank BTN (2021- Maret 2022).
- Human Capital Management Division Head Bank BTN (2019-2021).
- Human Capital Management & Culture Specialist Division Head Bank BTN (2017-2019).
- Human Capital Division Head Bank BTN (2017).
- Corporate Secretary Division Head Bank BTN (2015-2017).
- Pjs. Corporate Secretary Division Head Bank BTN (2014-2015).



Dasar Hukum Pengangkatan

Menjabat sebagai Direktur Perseroan untuk pertama kalinya sejak 10 Maret 2021 melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Perseroan dan dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tanggal 09 Agustus 2021.



Periode Menjabat

10 Maret 2021 - RUPS Tahun 2026, Periode Pertama.



Jabatan Rangkap

- Anggota Tetap Komite Aset dan Liabilitas Bank BTN
- Anggota Tetap Komite Manajemen Risiko Bank BTN
- Anggota Tetap Komite Human Capital Bank BTN
- Anggota Tetap Komite Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank BTN
- Anggota Tetap Komite Bisnis Bank BTN
- Anggota Tetap Komite Pengarah Transformasi Bank BTN
- Anggota Tetap Komite ESG Bank BTN

Periode jabatan sebagai Komite mengikuti Periode Jabatan sebagai Direktur Human Capital, Compliance and Legal.



Jabatan Rangkap pada Perusahaan Terbuka Lain

Tidak memiliki rangkap pada perusahaan lain atau pada institusi lain.



Kepemilikan Saham BBTN

Per 31 Desember 2023, memiliki 1.871.964 lembar saham/0,0133384%



ELISABETH NOVIE RISWANTI

Direktur Assets Management



Warga Negara Indonesia, berusia 56 Tahun Per Desember 2023, berdomisili di Bekasi.



Riwayat Pendidikan

Sarjana (S1) Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1991).



Sertifikasi

- International Risk Management Refreshment & Wealth Management Certification Program oleh MMUGM dan IBI (2022).
- Manajemen Risiko Perbankan Level 5 oleh LSPP (*Refreshment* 2022).



Pengalaman Kerja

- Direktur Assets Management Bank BTN (Maret 2022 - saat ini).
- Direktur Wholesale Risk and Asset Management Bank BTN (2021- Maret 2022).
- Direktur Remedial and Wholesale Risk Bank BTN (2019 - 2021)
- Direktur Collection and Asset Management Bank BTN (2019).
- Asset Management Division Head Bank BTN (2017 - 2019).



Dasar Hukum Pengangkatan

Menjabat sebagai Direktur Perseroan untuk pertama kalinya sejak 29 Agustus 2019 melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan dan dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak tanggal 26 Juni 2020.



Periode Menjabat

29 Agustus 2019 - RUPS Tahun 2024, Periode Pertama.



Jabatan Rangkap

- Anggota Tetap Komite Aset dan Liabilitas Bank BTN
- Anggota Tetap Komite Manajemen Risiko Bank BTN
- Anggota Tetap Komite Human Capital Bank BTN
- Anggota Tetap Komite Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank BTN
- Anggota Tetap RKK Komite A Fungsi Risiko Bank BTN
- Anggota Tetap Komite ESG Bank BTN

Periode jabatan sebagai Komite mengikuti Periode Jabatan sebagai Direktur Assets Management.



Jabatan Rangkap pada Perusahaan Terbuka Lain

Tidak memiliki rangkap pada perusahaan lain atau pada institusi lain.



Kepemilikan Saham BBTN

Per 31 Desember 2023, memiliki 1.733.200 lembar saham/ 0,0123496%



ANDI NIRWOTO

Direktur IT and Digital



Warga Negara Indonesia, berusia 53 Tahun Per Desember 2023, berdomisili di Jakarta Pusat.



Riwayat Pendidikan

- Sarjana (S1) Teknik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1994).
- Master (S2) Finance, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta/University of Lexington Kentucky, USA (1997).



Sertifikasi

- Manajemen Risiko Level 5 Direksi oleh IICD (*Refreshment* 2023).
- Digital Transformation for Boards, IMD Business School, Lausanne, Switzerland (2023).
- Digital Innovation Programme, Erasmus University - Rotterdam School of Management, Rotterdam, Netherlands (2022).
- IT Infrastructure Library (ITIL), APMG International Quint Wellington (2017).
- TOGAF 8, National University of Singapore (NUS), Singapore (2011).



Pengalaman Kerja

- Direktur IT and Digital Bank BTN (Maret 2022 - saat ini).
- Direktur Operation, IT, and Digital Banking Bank BTN (2019 - Maret 2022).
- Direktur IT & Operation Bank BTN (2018 - 2019).
- General Manager Operational Teknologi Informasi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2017 - 2018).
- General Manager Divisi Solusi & Security Teknologi Informasi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2015 - 2017).



Dasar Hukum Pengangkatan

Menjabat sebagai Direktur Perseroan untuk pertama kalinya sejak 23 Maret 2018 melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Perseroan dan dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tanggal 10 September 2018. Selanjutnya diberhentikan dengan hormat dan diangkat kembali sebagai Direktur IT and Digital Perseroan berdasarkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan pada tanggal 11 Januari 2023.



Periode Menjabat

- 23 Maret 2018 - RUPS Tahun 2023, Periode Pertama
- 11 Januari 2023 – RUPS Tahun 2027, Periode Kedua



Jabatan Rangkap

- Anggota Tetap Komite Aset dan Liabilitas Bank BTN
- Anggota Tetap Komite Pengarah Teknologi Informasi Bank BTN
- Anggota Tetap Komite Manajemen Risiko Bank BTN
- Anggota Tetap Komite Human Capital Bank BTN
- Anggota Tetap RKK Komite A Fungsi Risiko Bank BTN
- Anggota Tetap Komite Bisnis Bank BTN

Periode jabatan sebagai Komite mengikuti Periode Jabatan sebagai Direktur IT and Digital.



Jabatan Rangkap pada Perusahaan Terbuka Lain

Tidak memiliki rangkap pada perusahaan lain atau pada institusi lain.



Kepemilikan Saham BBTN

Per 31 Desember 2023, memiliki 1.822.161 lembar saham/0,0129835%

**JASMIN****Direktur Distribution and Funding**

Warga Negara Indonesia, berusia 59 Tahun Per Desember 2023, berdomisili di Jakarta Selatan.



Riwayat Pendidikan

- Sarjana (S1) Ekonomi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1988).
- Magister (S2) *International Business*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1998).



Sertifikasi

- Publik Manajemen Risiko dan Treasury Dealer Level 5 (*Refreshment* 2022).
- Certified Wealth Manager oleh CWM (2021).



Pengalaman Kerja

- Direktur Distribution and Funding Bank BTN (Maret 2022 - saat ini).
- Direktur Distribution and Retail Funding Bank BTN (2019 - Maret 2022).
- SEVP Consumer & Transaction PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2018 - 2019).
- Regional CEO IV/JKT 2 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2015 - 2018).
- Regional Manager IV-JKT PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2013 - 2015).



Dasar Hukum Pengangkatan

Menjabat sebagai Direktur Perseroan untuk pertama kalinya sejak 27 November 2019 melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan dan dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak tanggal 04 Mei 2020.



Periode Menjabat

27 November 2019 - RUPS Tahun 2024, Periode Pertama.



Jabatan Rangkap

- Anggota Tetap Komite Aset dan Liabilitas Bank BTN
- Anggota Tetap Komite Manajemen Risiko Bank BTN
- Anggota Tetap Komite Human Capital Bank BTN
- Anggota Tetap Komite Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank BTN
- Anggota Tetap RKK Komite A Fungsi Bisnis Bank BTN
- Anggota Tetap Komite Bisnis Bank BTN

Periode jabatan sebagai Komite mengikuti Periode Jabatan sebagai Direktur Distribution and Funding.



Jabatan Rangkap pada Perusahaan Terbuka Lain

Tidak memiliki rangkap pada perusahaan lain atau pada institusi lain.



Kepemilikan Saham BBTN

Per 31 Desember 2023, memiliki 2.848.030 lembar saham/0,0202931%



SETIYO WIBOWO

Direktur Risk Management



Warga Negara Indonesia, berusia 46 Tahun Per Desember 2023, berdomisili di Tangerang Selatan.



Riwayat Pendidikan

- Sarjana (S1) Teknik Elektro, Institut Teknologi Bandung, Bandung (1999).
- Master (S2) MBA in Finance & Banking, KDI School of Public Policy and Management, Korea Selatan (2009).



Sertifikasi

Manajemen Risiko Level 5 oleh LSPP (*Refreshment* 2022).



Pengalaman Kerja

- Direktur Risk Management Bank BTN (Maret 2022 - saat ini).
- Direktur Risk Management and Transformation Bank BTN (2021 - Maret 2022).
- Direktur Enterprise Risk Management, Big Data, and Analytics Bank BTN (2019 - 2021).
- Group Head Consumer Credit Risk & Analytics PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2018 - 2019).
- Group Head Credit Portfolio Risk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2017 - 2018).



Dasar Hukum Pengangkatan

Menjabat sebagai Direktur Perseroan untuk pertama kalinya sejak 27 November 2019 melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan dan dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak tanggal 03 Juli 2020.



Periode Menjabat

27 November 2019 - RUPS Tahun 2024, Periode Pertama.



Jabatan Rangkap

- Anggota Tetap Komite Aset dan Liabilitas Bank BTN
- Anggota Tetap Komite Pengarah Teknologi Informasi Bank BTN
- Anggota Tetap Komite Human Capital Bank BTN
- Anggota Tetap Komite Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank BTN
- Anggota Tetap RKK Komite A Fungsi Risiko Bank BTN
- Anggota Tetap Komite Bisnis Bank BTN
- Anggota Tetap Komite Pengarah Transformasi Bank BTN
- Anggota Tetap Komite ESG Bank BTN

Periode jabatan sebagai Komite mengikuti Periode Jabatan sebagai Direktur Risk Management.



Jabatan Rangkap pada Perusahaan Terbuka Lain

Tidak memiliki rangkap pada perusahaan lain atau pada institusi lain.



Kepemilikan Saham BBTN

Per 31 Desember 2023, memiliki 1.892.700 lembar saham/0,0134861%



HAKIM PUTRATAMA

Direktur Institutional Banking



Warga Negara Indonesia, berusia 47 Tahun Per Desember 2023, berdomisili di Tangerang Selatan.



Riwayat Pendidikan

- Sarjana (S1) Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Padjajaran, Bandung (1998).
- Master (S2) International Business, Aston University, Inggris (2001).



Sertifikasi

Manajemen Risiko Level 5 oleh BSMR (*Refreshment* 2023).



Pengalaman Kerja

- Direktur Institutional Banking Bank BTN (Maret 2023 - saat ini).
- Head of International and Transaction Banking PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk (Mei 2022 – Maret 2023).
- Senior Vice President (SVP) Consumer Funding Retail Division PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk (2018-2022).
- Senior Vice President (SVP) Corporate Secretary Division PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk (2015-2018)
- Senior Vice President (SVP) Head of Marketing & Segment Offering PT Bank Commonwealth (2012 – 2015).



Dasar Hukum Pengangkatan

Menjabat sebagai Direktur Perseroan untuk pertama kalinya sejak 16 Maret 2023 melalui Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Perseroan dan dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 26 Juli 2023.



Periode Menjabat

16 Maret 2023 - RUPS Tahun 2028, Periode Pertama



Jabatan Rangkap

- Anggota Tetap Komite Aset dan Liabilitas Bank BTN
- Anggota Tetap Komite Manajemen Risiko Bank BTN
- Anggota Tetap Komite Human Capital Bank BTN
- Anggota Tetap Komite Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank BTN
- Anggota Tetap RKK Komite A Fungsi Bisnis Bank BTN
- Anggota Tetap Komite Bisnis Bank BTN

Periode jabatan sebagai Komite mengikuti Periode Jabatan sebagai Direktur Institutional Banking.



Jabatan Rangkap pada Perusahaan Terbuka Lain

Tidak memiliki rangkap pada perusahaan lain atau pada institusi lain.



Kepemilikan Saham BBTN

Per 31 Desember 2023, tidak memiliki saham BBTN



HARU KOESMAHARGYO*

Direktur Utama

* Berhenti menjabat sejak 16 Maret 2023 berdasarkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun 2023.



Warga Negara Indonesia, berusia 57 Tahun Per Desember 2023, berdomisili di Jakarta Selatan.



Riwayat Pendidikan

- Sarjana (S1) Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya, Malang (1989).
- Master (S2) Investment Banking, Emory University, Atlanta USA (2000).



Sertifikasi

- Manajemen Risiko Level 5 oleh BSMR (Refreshment 2021).



Pengalaman Kerja

- Direktur Utama Bank BTN (Maret 2021 – 2023).
- Direktur Keuangan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2017-2021).
- Direktur Keuangan dan Treasury PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2015-2017).
- Presiden Komisaris PT BTMU – BRI Finance (2014-2015).
- Kepala Divisi Treasury PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2014-2015).



Dasar Hukum Pengangkatan

Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan untuk pertama kalinya sejak 10 Maret 2021 melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Perseroan dan dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 19 Mei 2021.



Periode Menjabat

10 Maret 2021 – 16 Maret 2023, Periode Pertama



Jabatan Rangkap

- Ketua merangkap Anggota Tetap Komite Aset dan Liabilitas Bank BTN
- Anggota Tetap Komite Pengarah Teknologi Informasi Bank BTN
- Ketua merangkap Anggota Tetap Komite Manajemen Risiko Bank BTN
- Anggota Tetap Komite Human Capital Bank BTN
- Anggota Tetap Komite Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank BTN
- Anggota Tetap RKK Komite A Fungsi Risiko Bank BTN
- Ketua merangkap Anggota Tetap Komite Bisnis Bank BTN
- Ketua merangkap Anggota Tetap Komite ESG Bank BTN

Berhenti menjabat sebagai komite pada tanggal 16 Maret 2023.



Jabatan Rangkap pada Perusahaan Terbuka Lain

Tidak memiliki rangkap pada perusahaan lain atau pada institusi lain.



Kepemilikan Saham BBTN

Per 28 Februari 2023, memiliki 403.600 lembar saham/0,0028758%

Hubungan Afiliasi Anggota Direksi

Tabel Hubungan Afiliasi Direksi

Hubungan Keuangan, Keluarga dan Kepengurusan Direksi															
Nama	Jabatan	Hubungan Keuangan Dengan						Hubungan Keluarga Dengan						Hubungan Kepengurusan	
		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali			
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Nixon L. P. Napitupulu	Direktur Utama		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Oni Febriarto R.	Wakil Direktur Utama		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Hirwandi Gafar	Direktur Consumer		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Nofry Rony Poetra	Direktur Finance		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Eko Waluyo	Direktur Human Capital, Compliance and Legal		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Elisabeth Novie Riswanti	Direktur Assets Management		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Andi Nirwoto	Direktur IT and Digital		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Jasmin	Direktur Distribution and Funding		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Setiyo Wibowo	Direktur Risk Management		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Hakim Putratama	Direktur Institutional Banking		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓

Pendidikan dan/atau Pelatihan Direksi

Uraian pendidikan dan/atau pelatihan Direksi selama tahun Buku disajikan pada Bab Tata Kelola Perusahaan.

Perubahan Komposisi Anggota Direksi dan Alasan Perubahannya

Selama tahun 2023, telah terjadi perubahan komposisi Direksi. Perubahan komposisi Direksi dilakukan berdasarkan kebutuhan Perseroan. Perubahan komposisi Direksi adalah sebagai berikut:

Komposisi Direksi Periode 1 Januari 2023 – 10 Januari 2023

Komposisi Direksi periode 1 Januari 2023 sampai dengan 10 Januari 2023 berjumlah 9 (Sembilan) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama, 1 (satu) orang Wakil Direktur Utama dan 7 (tujuh) orang Direktur. Seluruh Anggota Direksi berdomisili di wilayah kerja Kantor Pusat Perseroan. Komposisi dan dasar pengangkatan Anggota Direksi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel Komposisi dan Dasar Pengangkatan Direksi

Nama	Jabatan	Pelaksana	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif
Haru Koesmahargo	Direktur Utama	OJK	RUPS Tahunan tanggal 10 Maret 2021	19 Mei 2021
Nixon L. P. Napitupulu	Wakil Direktur Utama	OJK	- RUPS Tahunan tanggal 17 Maret 2017 - RUPS Tahunan tanggal 10 Maret 2021 - RUPS Tahunan tanggal 2 Maret 2022	19 Mei 2021
Hirwandi Gafar	Direktur Consumer	OJK	RUPS Luar Biasa tanggal 27 November 2019	28 Agustus 2020

Nama	Jabatan	Pelaksana	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif
Nofry Rony Poetra	Direktur Finance	OJK	RUPS Tahunan tanggal 10 Maret 2021	9 Agustus 2021
Eko Waluyo	Direktur Human Capital, Compliance and Legal	OJK	RUPS Tahunan tanggal 10 Maret 2021	9 Agustus 2021
Elisabeth Novie Riswanti	Direktur Assets Management	OJK	RUPS Luar Biasa tanggal 29 Agustus 2019	26 Juni 2020
Andi Nirwoto	Direktur IT and Digital	OJK	RUPS Tahunan tanggal 23 Maret 2018	10 September 2018
Jasmin	Direktur Distribution and Funding	OJK	RUPS Luar Biasa tanggal 27 November 2019	4 Mei 2020
Setiyo Wibowo	Direktur Risk Management	OJK	RUPS Luar Biasa tanggal 27 November 2019	3 Juli 2020

Komposisi Direksi Periode 11 Januari 2023 – 15 Maret 2023

Pada tanggal 11 Januari 2023, RUPS Luar Biasa memutuskan untuk memberhentikan dengan hormat serta mengangkat kembali Andi Nirwoto sebagai Direktur IT and Digital. Sehingga komposisi Direksi periode 11 Januari 2023 sampai dengan 15 Maret 2023 berjumlah 9 (Sembilan) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama, 1 (satu) orang Wakil Direktur Utama dan 7 (tujuh) orang Direktur. Seluruh Anggota Direksi berdomisili di wilayah kerja Kantor Pusat Perseroan. Komposisi dan dasar pengangkatan Anggota Direksi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel Komposisi dan Dasar Pengangkatan Direksi

Nama	Jabatan	Pelaksana	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif
Haru Koesmahargyo	Direktur Utama	OJK	RUPS Tahunan tanggal 10 Maret 2021	19 Mei 2021
Nixon L. P. Napitupulu	Wakil Direktur Utama	OJK	- RUPS Tahunan tanggal 17 Maret 2017 - RUPS Tahunan tanggal 10 Maret 2021 - RUPS Tahunan tanggal 2 Maret 2022	19 Mei 2021
Hirwandi Gafar	Direktur Consumer	OJK	RUPS Luar Biasa tanggal 27 November 2019	28 Agustus 2020
Nofry Rony Poetra	Direktur Finance	OJK	RUPS Tahunan tanggal 10 Maret 2021	9 Agustus 2021
Eko Waluyo	Direktur Human Capital, Compliance and Legal	OJK	RUPS Tahunan tanggal 10 Maret 2021	9 Agustus 2021
Elisabeth Novie Riswanti	Direktur Assets Management	OJK	RUPS Luar Biasa tanggal 29 Agustus 2019	26 Juni 2020
Andi Nirwoto	Direktur IT and Digital	OJK	- RUPS Tahunan tanggal 23 Maret 2018 - RUPS Luar Biasa tanggal 11 Januari 2023	11 Januari 2023
Jasmin	Direktur Distribution and Funding	OJK	RUPS Luar Biasa tanggal 27 November 2019	4 Mei 2020
Setiyo Wibowo	Direktur Risk Management	OJK	RUPS Luar Biasa tanggal 27 November 2019	3 Juli 2020

Komposisi Direksi Periode 16 Maret 2023 – 31 Desember 2023

Pada tanggal 16 Maret 2023, RUPS Tahunan 2023 memutuskan:

1. Memberhentikan dengan hormat Haru Koesmahargyo sebagai Direktur Utama Perseroan.
2. Mengalihkan penugasan Nixon L. P. Napitupulu yang semula sebagai Wakil Direktur Utama menjadi Direktur Utama Perseroan.
3. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:
 - a. Oni Febriarto Rahardjo - sebagai Wakil Direktur Utama;
 - b. Hakim Putratama - sebagai Direktur Institutional Banking

Sehingga komposisi Direksi periode 16 Maret 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 berjumlah 10 (sepuluh) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama, 1 (satu) orang Wakil Direktur Utama dan 8 (delapan) orang Direktur. Seluruh Anggota Direksi berdomisili di wilayah kerja Kantor Pusat Perseroan. Komposisi dan dasar pengangkatan Anggota Direksi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel Komposisi dan Dasar Pengangkatan Direksi

Nama	Jabatan	Pelaksana	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif
Nixon L. P. Napitupulu	Direktur Utama	OJK	- RUPS Tahunan tanggal 17 Maret 2017 - RUPS Tahunan tanggal 10 Maret 2021 - RUPS Tahunan tanggal 2 Maret 2022 - RUPS Tahunan tanggal 16 Maret 2023	7 Juni 2023
Oni Febriarto Rahardjo	Wakil Direktur Utama	OJK	RUPS Tahunan tanggal 16 Maret 2023	7 Juni 2023
Hirwandi Gafar	Direktur Consumer	OJK	RUPS Luar Biasa tanggal 27 November 2019	28 Agustus 2020
Nofry Rony Poetra	Direktur Finance	OJK	RUPS Tahunan tanggal 10 Maret 2021	9 Agustus 2021
Eko Waluyo	Direktur Human Capital, Compliance and Legal	OJK	RUPS Tahunan tanggal 10 Maret 2021	9 Agustus 2021
Elisabeth Novie Riswanti	Direktur Assets Management	OJK	RUPS Luar Biasa tanggal 29 Agustus 2019	26 Juni 2020
Andi Nirwoto	Direktur IT and Digital	OJK	RUPS Tahunan tanggal 23 Maret 2018	10 September 2018
Jasmin	Direktur Distribution and Funding	OJK	RUPS Luar Biasa tanggal 27 November 2019	4 Mei 2020
Setiyo Wibowo	Direktur Risk Management	OJK	RUPS Luar Biasa tanggal 27 November 2019	3 Juli 2020
Hakim Putratama	Direktur Institutional Banking	OJK	RUPS Tahunan tanggal 16 Maret 2023	26 Juli 2023



Profil Dewan Komisaris



CHANDRA M. HAMZAH

Komisaris Utama/Independen



Warga Negara Indonesia, berusia 56 Tahun Per Desember 2023, berdomisili di Jakarta Selatan.



Riwayat Pendidikan

- Sarjana (S1) Hukum, Universitas Indonesia (1995).



Sertifikasi

Manajemen Risiko Perbankan Level 2 oleh LSPP (*Refreshment* 2023).



Pengalaman Kerja

- Komisaris Utama/Independen Bank BTN (2019 - saat ini).
- Komisaris Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (2014 - 2015).
- Partner of Assegaf Hamzah & Partners Law Firm (2012 - saat ini).
- Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (2007 - 2011).
- Partner of Assegaf Hamzah & Partners Law Firm (2001 - 2007).



Dasar Hukum Pengangkatan

Menjabat sebagai Komisaris Utama sekaligus Komisaris Independen Perseroan untuk pertama kalinya sejak 27 November 2019 melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan dan dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak 04 Mei 2020.



Periode Menjabat

27 November 2019 - RUPS Tahun 2024, Periode Pertama



Jabatan Rangkap

- Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi Bank BTN (2020-saat ini).
- Partner of Assegaf Hamzah & Partners Law Firm (2012 – saat ini).



Jabatan Rangkap pada Perusahaan Terbuka Lain

Tidak memiliki rangkap jabatan pada perusahaan terbuka lain.



Kepemilikan Saham BBTN

Per 31 Desember 2023, tidak memiliki saham BBTN



IQBAL LATANRO

Wakil Komisaris Utama/Independen



Warga Negara Indonesia, berusia 65 Tahun Per Desember 2023, berdomisili di Jakarta Selatan.



Riwayat Pendidikan

- Sarjana (S1) Ekonomi, Universitas Hasanuddin, Makassar (1983).
- Magister (S2) Manajemen Bisnis, Universitas Hasanuddin, Makassar (1998).



Sertifikasi

Manajemen Risiko Level 5 oleh LSPP (*Refreshment* 2023).



Pengalaman Kerja

- Wakil Komisaris Utama/Independen Bank BTN (2021 - saat ini).
- Komisaris PT Bank Mandiri Taspen (2020 - 2021).
- Komisaris PT Pemeringkat Efek Indonesia (2020 - 2021).
- Direktur Utama PT Taspen (Persero) (2018 - 2020).
- Komisaris Utama PT Taspen Properti Indonesia (2015 - 2020).



Dasar Hukum Pengangkatan

Menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama/Independen Perseroan untuk pertama kalinya sejak 10 Maret 2021 melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Perseroan dan dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tanggal 06 September 2021.



Periode Menjabat

10 Maret 2021 - RUPS Tahun 2026, Periode Pertama



Jabatan Rangkap

- Ketua Komite Audit Bank BTN (2021-saat ini).
- Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Bank BTN (2021-saat ini).



Jabatan Rangkap pada Perusahaan Terbuka Lain

Tidak memiliki rangkap jabatan pada perusahaan terbuka lain.



Kepemilikan Saham BBTN

Per 31 Desember 2023, tidak memiliki saham BBTN



ARMAND B. ARIEF

Komisaris Independen



Warga Negara Indonesia, berusia 71 Tahun Per Desember 2022, berdomisili di Jakarta Selatan.



Riwayat Pendidikan

- Sarjana (S1) *Business Administration*, Curry College, Milton Massachusetts, Amerika Serikat (1982).
- Master (S2) *Business Administration*, Suffolk University, Boston Massachusetts, Amerika Serikat (1995)..



Sertifikasi

Manajemen Risiko Level 4 oleh LSPP (*Refreshment* 2021).



Pengalaman Kerja

- Komisaris Independen PT Cardig Aero Services Tbk (2021 - saat ini).
- Komisaris Independen Bank BTN (2019 - saat ini).
- Komisaris Independen PT Bank Royal Indonesia (2017 - 2018).
- Komisaris/Senior Consultant Dunamis Organization Services (Franklin Covey USA Subsidiary (2016 - 2019).
- Anggota Panel Interviewer Otoritas Jasa Keuangan (2016 - 2017).



Dasar Hukum Pengangkatan

Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan untuk pertama kalinya sejak 27 November 2019 melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan dan dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak tanggal 14 Mei 2020.



Periode Menjabat

27 November 2019 - RUPS Tahun 2024, Periode Pertama



Jabatan Rangkap

- Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Bank BTN (2020-saat ini).
- Ketua Komite Pemantau Risiko Bank BTN (2020-saat ini).



Jabatan Rangkap pada Perusahaan Terbuka Lain

Komisaris Independen PT Cardig Aero Services Tbk (2021 — saat ini).



Kepemilikan Saham BBTN

Per 31 Desember 2023, tidak memiliki saham BBTN



SENTOT A. SENTAUSA

Komisaris Independen



Warga Negara Indonesia, berusia 66 Tahun Per Desember 2023, berdomisili di Jakarta Selatan.



Riwayat Pendidikan

- Sarjana (S1) Statistika, Universitas Padjajaran, Bandung (1985).
- Master (S2) *Business Administration*, Monash University, Australia (1995).



Sertifikasi

Manajemen Risiko Perbankan Level 5 oleh LSPP (Refreshment 2022).



Pengalaman Kerja

- Komisaris Independen Bank BTN (2022 - saat ini).
- Komisaris Utama PT Jiwasraya (Persero) (2019 - 2020).
- Komisaris Utama Mandiri Inhealth (2016 - 2019).
- Direktur Distribution PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2015 - 2016).
- Direktur Risk Management PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2006 - 2014).



Dasar Hukum Pengangkatan

Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan untuk pertama kalinya sejak 2 Maret 2022 melalui Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Perseroan dan dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak tanggal 8 Agustus 2022.



Periode Menjabat

2 Maret 2022 – RUPS Tahun 2027, Periode Pertama



Jabatan Rangkap

- Anggota Komite Audit Bank BTN (2022-saat ini).
- Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Bank BTN (2022-saat ini)



Jabatan Rangkap pada Perusahaan Terbuka Lain

Tidak memiliki rangkap jabatan pada perusahaan terbuka lain.



Kepemilikan Saham BBTN

Per 31 Desember 2023, tidak memiliki saham BBTN



ANDIN HADIYANTO

Komisaris



Warga Negara Indonesia, berusia 58 Tahun Per Desember 2023, berdomisili di Bekasi.



Riwayat Pendidikan

- Sarjana (S1) Ekonomi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1989).
- Master (S2) *International Development*, Nagoya University, Jepang (1997).
- Doctor (S3) *International Development*, Nagoya University, Jepang (2000).



Sertifikasi

Manajemen Risiko Perbankan Level 1 Komisaris oleh LSPP (2022).



Pengalaman Kerja

- Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) dan Plt. Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), Kementerian Keuangan (2021 - saat ini).
- Komisaris Bank BTN (2019 - saat ini).
- Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan (2019 - 2021).
- Staf Ahli Makro Ekonomi dan Keuangan Internasional, Kementerian Keuangan (2018 - 2019).
- Direktur Eksekutif, Bank Dunia (2016 - 2018).



Dasar Hukum Pengangkatan

Menjabat sebagai Komisaris Perseroan untuk pertama kalinya sejak 27 November 2019 melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan dan dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak tanggal 10 Juli 2020



Periode Menjabat

27 November 2019 - RUPS Tahun 2024, Periode Pertama



Jabatan Rangkap

- Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) dan Plt. Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), Kementerian Keuangan (2021 – saat ini).
- Anggota Komite Audit Bank BTN (2020-saat ini).
- Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Bank BTN (2020-saat ini).



Jabatan Rangkap pada Perusahaan Terbuka Lain

Tidak memiliki rangkap jabatan pada perusahaan terbuka lain.



Kepemilikan Saham BBTN

Per 31 Desember 2023, tidak memiliki saham BBTN



HERRY TRISAPUTRA ZUNA

Komisaris



Warga Negara Indonesia, berusia 56 Tahun Per Desember 2023, berdomisili di Jakarta Barat.



Riwayat Pendidikan

- Sarjana (S1) Teknik Sipil, Institut Teknologi Bandung, Bandung (1992).
- Sarjana (S1) Manajemen, Universitas Padjajaran, Bandung (1993).
- Magister (S2) Sistem dan Teknik Jalan Raya, Institut Teknologi Bandung, Bandung (1994).
- Doktor (S3) Teknik Sipil, Universitas Indonesia, Depok (2016).



Sertifikasi

Manajemen Risiko Level 1 Komisaris oleh LSPP (2022).



Pengalaman Kerja

- Komisaris Bank BTN (2022 - saat ini).
- Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (2021 - saat ini).
- Direktur Pengembangan Sistem Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (2019 - 2021).
- Komisaris PT Wijaya Karya Beton Tbk (2017 - 2019).
- Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Indonesia, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (2015 - 2019).



Dasar Hukum Pengangkatan

Menjabat sebagai Komisaris Perseroan untuk pertama kalinya sejak tanggal 2 Maret 2022 melalui Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Perseroan dan dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 11 Oktober 2022.



Periode Menjabat

2 Maret 2022 - RUPS Tahun 2027, Periode Pertama



Jabatan Rangkap

- Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Bank BTN (2022-saat ini).
- Anggota Komite Pemantau Risiko Bank BTN (2022-saat ini).
- Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (2021 - saat ini).



Jabatan Rangkap pada Perusahaan Terbuka Lain

Tidak memiliki rangkap jabatan pada perusahaan terbuka lain.



Kepemilikan Saham BBTN

Per 31 Desember 2023, memiliki 404.600 lembar saham/ 0,0028829%



HIMAWAN ARIEF SUGOTO

Komisaris



Warga Negara Indonesia, berusia 60 Tahun Per Desember 2023, berdomisili di Depok.



Riwayat Pendidikan

- Sarjana (S1) Teknik Sipil, Institut Teknologi Bandung, Bandung (1990).
- Magister (S2) Teknik Sipil, Universitas Indonesia, Jakarta (2001).
- Doktor (S3) Manajemen dan Bisnis, Institut Pertanian Bogor, Bogor (2023).



Sertifikasi

Manajemen Risiko Level 1 Komisaris oleh LSPP (Refreshment 2023).



Pengalaman Kerja

- Penasihat Utama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Bidang Ekonomi Pertanahan (2023-saat ini).
- Komisaris Bank BTN (2022 - saat ini).
- Sekretaris Komite Badan Bank Tanah (2021 - 2023).
- Komisaris PT Rajawali Nusantara Indonesia (Holding Pangan) (2020 - 2022).
- Plt. Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (2020 - 2021).
- Sekretaris Jenderal Komisaris Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (2018 - 2023).



Dasar Hukum Pengangkatan

Menjabat sebagai Komisaris Perseroan untuk pertama kalinya sejak tanggal 2 Maret 2022 melalui Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Perseroan dan dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 03 Oktober 2022.



Periode Menjabat

2 Maret 2022 - RUPS Tahun 2027, Periode Pertama



Jabatan Rangkap

- Penasihat Utama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Bidang Ekonomi Pertanahan (2023-saat ini).
- Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Bank BTN (2022-saat ini).
- Anggota Komite Pemantau Risiko Bank BTN (2022-saat ini).
- Sekretaris Komite Badan Bank Tanah (2021 - 2023).
- Sekretaris Jenderal Komisaris Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (2018 - 2023).



Jabatan Rangkap pada Perusahaan Terbuka Lain

Tidak memiliki rangkap jabatan pada perusahaan terbuka lain.



Kepemilikan Saham BBTN

Per 31 Desember 2023, memiliki 404.600 lembar saham/ 0,0028829%



MOHAMAD YUSUF PERMANA

Komisaris



Warga Negara Indonesia, berusia 48 Tahun Per Desember 2023, berdomisili di Jakarta Selatan.



Riwayat Pendidikan

Sarjana (S1) Ekonomi, Universitas Gunadarma, Jakarta (1999).



Sertifikasi

Kompetensi Manajemen Risiko Tingkat 1 (satu) oleh BSMR (2023).



Pengalaman Kerja

- Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (2023—saat ini).
- Kepala Biro Protokol Sekretariat Presiden Kementerian Sekretaris Negara (2021—saat ini).
- Komisaris PT Pelindo Multi Terminal (2021).
- Komisaris PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) (2021).
- Komisaris PT Djakarta Lloyd (2020).



Dasar Hukum Pengangkatan

Menjabat sebagai Komisaris Perseroan untuk pertama kalinya sejak tanggal 11 Januari 2023 melalui Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan dan dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 07 Juni 2023.



Periode Menjabat

11 Januari 2023 – RUPS Tahun 2028, Periode Pertama



Jabatan Rangkap

- Kepala Biro Protokol Sekretariat Presiden Kementerian Sekretaris Negara (2021 —saat ini).
- Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Bank BTN (2023—saat ini).



Jabatan Rangkap pada Perusahaan Terbuka Lain

Tidak memiliki rangkap jabatan pada perusahaan terbuka lain.



Kepemilikan Saham BBTN

Per 31 Desember 2023, tidak memiliki saham BBTN



AHDI JUMHARI LUDDIN*

Komisaris Independen

*Berhenti menjabat sejak tanggal 12 Agustus 2023 karena meninggal dunia.



Warga Negara Indonesia, berusia 69 Tahun Per Agustus 2023, berdomisili di Jakarta Timur.



Riwayat Pendidikan

- Sarjana (S1) Ekonomi, Universitas Indonesia, Jakarta (1982).
- Master (S2) Policy Economics, University of Illinois, Urbana-Champaign, Amerika Serikat (1989).



Sertifikasi

Manajemen Risiko Perbankan Level 5 oleh LSPP (*Refreshment* 2022).



Pengalaman Kerja

- Komisaris Independen Bank BTN (2019 - 2023).
- Komisaris Utama PT BRI Agroniaga Tbk (2019).
- Komisaris Independen PT Bank DKI (2015 - 2018).
- Direktur Hukum dan Kepatuhan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2010 - 2015).
- Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2008 - 2010).



Dasar Hukum Pengangkatan

Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan untuk pertama kalinya sejak 27 November 2019 melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan dan dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak tanggal 16 Maret 2020.



Periode Menjabat

27 November 2019 - 12 Agustus 2023



Jabatan Rangkap

Anggota Komite Audit Bank BTN (2020-2023).



Jabatan Rangkap pada Perusahaan Terbuka Lain

Tidak memiliki rangkap jabatan pada perusahaan terbuka lain.



Kepemilikan Saham BBTN

Per 12 Agustus 2023, tidak memiliki saham BBTN

Hubungan Afiliasi Anggota Dewan Komisaris

Tabel Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris

Hubungan Keuangan, Keluarga dan Kepengurusan Komisaris															
Nama	Jabatan	Hubungan Keuangan Dengan						Hubungan Keluarga Dengan						Hubungan Kepengurusan	
		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali			
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Chandra M. Hamzah	Komisaris Utama/ Independen		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Iqbal Latanro	Wakil Komisaris Utama/ Independen		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Armand B. Arief	Komisaris Independen		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Sentot A. Sentausa	Komisaris Independen		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Andin Hadiyanto	Komisaris		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Herry Trisaputra Zuna	Komisaris		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Himawan Arief Sugoto	Komisaris		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Mohamad Yusuf Permana	Komisaris		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓

Pendidikan dan/atau Pelatihan Dewan Komisaris

Uraian pendidikan dan/atau pelatihan Dewan Komisaris selama tahun Buku disajikan pada Bab Tata Kelola Perusahaan.

Perubahan Komposisi Anggota Dewan Komisaris dan Alasan Perubahannya

Selama tahun 2023, telah terjadi perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris. Perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan kebutuhan Perseroan. Perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

Komposisi Dewan Komisaris Periode 1 Januari 2023 – 10 Januari 2023

Komposisi Dewan Komisaris periode 1 Januari 2023 sampai dengan 10 Januari 2023 sebanyak 8 (delapan) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama/Independen, 1 (satu) orang Wakil Komisaris Utama/Independen, 3 (tiga) orang Komisaris Independen dan 3 (tiga) orang Komisaris. Seluruh Dewan Komisaris berdomisili di wilayah kerja Kantor Pusat Perseroan. Komposisi dan dasar pengangkatan Dewan Komisaris dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel Komposisi dan Dasar Pengangkatan Dewan Komisaris Periode 1 Januari 2023 - 10 Januari 2023

Nama	Jabatan	Pelaksana	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif
Chandra M. Hamzah	Komisaris Utama/Independen	OJK	RUPS Luar Biasa tanggal 27 November 2019	4 Mei 2020
Iqbal Latanro	Wakil Komisaris Utama/Independen	OJK	RUPS Tahunan tanggal 10 Maret 2021	6 September 2021
Armand B. Arief	Komisaris Independen	OJK	RUPS Luar Biasa tanggal 27 November 2019	14 Mei 2020
Ahdi Jumhari Luddin	Komisaris Independen	OJK	RUPS Luar Biasa tanggal 27 November 2019	16 Maret 2020
Sentot A. Sentausa	Komisaris Independen	OJK	RUPS Tahunan tanggal 2 Maret 2022	8 Agustus 2022
Andin Hadiyanto	Komisaris	OJK	RUPS Luar Biasa tanggal 27 November 2019	10 Juli 2020
Herry Trisaputra Zuna	Komisaris	OJK	RUPS Tahunan tanggal 2 Maret 2022	11 Oktober 2022
Himawan Arief Sugoto	Komisaris	OJK	RUPS Tahunan tanggal 2 Maret 2022	3 Oktober 2022

Komposisi Dewan Komisaris Periode 11 Januari 2023 – 11 Agustus 2023

Berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Tahun 2023, Mohamad Yusuf Permana diangkat menjadi Komisaris Perseroan. Sehingga komposisi Dewan Komisaris periode 11 Januari 2023 sampai dengan 11 Agustus 2023 sebanyak 9 (sembilan) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama/Independen, 1 (satu) orang Wakil Komisaris Utama/Independen, 3 (tiga) orang Komisaris Independen dan 4 (empat) orang Komisaris. Seluruh Dewan Komisaris berdomisili di wilayah kerja Kantor Pusat Perseroan. Komposisi dan dasar pengangkatan Dewan Komisaris dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel Komposisi dan Dasar Pengangkatan Dewan Komisaris Periode 11 Januari 2023 – 11 Agustus 2023

Nama	Jabatan	Pelaksana	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif
Chandra M. Hamzah	Komisaris Utama/ Independen	OJK	RUPS Luar Biasa tanggal 27 November 2019	4 Mei 2020
Iqbal Latanro	Wakil Komisaris Utama/ Independen	OJK	RUPS Tahunan tanggal 10 Maret 2021	6 September 2021
Armand B. Arief	Komisaris Independen	OJK	RUPS Luar Biasa tanggal 27 November 2019	14 Mei 2020
Ahdi Jumhari Luddin	Komisaris Independen	OJK	RUPS Luar Biasa tanggal 27 November 2019	16 Maret 2020
Sentot A. Sentausa	Komisaris Independen	OJK	RUPS Tahunan tanggal 2 Maret 2022	8 Agustus 2022
Andin Hadiyanto	Komisaris	OJK	RUPS Luar Biasa tanggal 27 November 2019	10 Juli 2020
Herry Trisaputra Zuna	Komisaris	OJK	RUPS Tahunan tanggal 2 Maret 2022	11 Oktober 2022
Himawan Arief Sugoto	Komisaris	OJK	RUPS Tahunan tanggal 2 Maret 2022	3 Oktober 2022
Mohamad Yusuf Permana	Komisaris	OJK	RUPS Luar Biasa tanggal 11 Januari 2023	07 Juni 2023

Komposisi Dewan Komisaris Periode 12 Agustus 2023 – 31 Desember 2023

Pada tanggal 12 Agustus 2023, Ahdi Jumhari Luddin sebagai Komisaris Independen Perseroan meninggal dunia sehingga demikian masa jabatan Yang Bersangkutan berakhir dengan sendirinya. Sehingga komposisi Dewan Komisaris periode 12 Agustus 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebanyak 8 (delapan) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama/Independen, 1 (satu) orang Wakil Komisaris Utama/Independen, 2 (dua) orang Komisaris Independen dan 4 (empat) orang Komisaris. Seluruh Dewan Komisaris berdomisili di wilayah kerja Kantor Pusat Perseroan. Komposisi dan dasar pengangkatan Dewan Komisaris dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel Komposisi dan Dasar Pengangkatan Dewan Komisaris Periode 12 Agustus 2023 – 31 Desember 2023

Nama	Jabatan	Pelaksana	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif
Chandra M. Hamzah	Komisaris Utama/ Independen	OJK	RUPS Luar Biasa tanggal 27 November 2019	4 Mei 2020
Iqbal Latanro	Wakil Komisaris Utama/ Independen	OJK	RUPS Tahunan tanggal 10 Maret 2021	6 September 2021
Armand B. Arief	Komisaris Independen	OJK	RUPS Luar Biasa tanggal 27 November 2019	14 Mei 2020
Sentot A. Sentausa	Komisaris Independen	OJK	RUPS Tahunan tanggal 2 Maret 2022	8 Agustus 2022
Andin Hadiyanto	Komisaris	OJK	RUPS Luar Biasa tanggal 27 November 2019	10 Juli 2020
Herry Trisaputra Zuna	Komisaris	OJK	RUPS Tahunan tanggal 2 Maret 2022	11 Oktober 2022
Himawan Arief Sugoto	Komisaris	OJK	RUPS Tahunan tanggal 2 Maret 2022	3 Oktober 2022
Mohamad Yusuf Permana	Komisaris	OJK	RUPS Luar Biasa tanggal 11 Januari 2023	07 Juni 2023

Profil

Dewan Pengawas Syariah



PROF. DR. H. MUHAMMAD QURAISH SHIHAB, M.A

Ketua Dewan Pengawas Syariah



Warga Negara Indonesia, berusia 80 Tahun Per Desember 2023, berdomisili di Jakarta Selatan.



Riwayat Pendidikan

- Sarjana (S1) bidang Tafsir dan Hadits dari Universitas Al-Azhar Kairo Mesir (1967).
- Pascasarjana (S2) bidang Tafsir dan Hadits dari Universitas Al-Azhar Kairo Mesir (1969).
- Doktor (S3) bidang Tafsir dan Hadits dari Universitas Al-Azhar Kairo Mesir (1982).



Sertifikasi

- Ijtima' Sanawi & Semiloka DPS-DSM MUI (2019).
- Ijtima' Sanawi & Annual Meeting DPS VIII (2023).



Pengalaman Kerja

- Ketua Dewan Pengawas Syariah Bank BTN (2019 - saat ini).
- Pendiri dan Anggota Council of Muslim Elders (2014 - saat ini).
- Anggota Eminent Person Group Indonesia Malaysia Person Group Indonesia Malaysia (2010).
- Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Arab, Mesir dan Jibuti (1998 - 2002).
- Menteri Agama Republik Indonesia (1998).
- Anggota Dewan Riset Nasional (1995 - 1999).
- Anggota Badan Akreditasi Nasional (1994 - 1998).
- Direktur Pengkaderan Ulama MUI (1994 - 1997).
- Anggota DPS Bank Muamalat (1992 - 1999).
- Rektor IAIN Syarif Hidayatullah (1992 - 1998).
- Anggota Pentashih Al-Qur'an Departemen Agama RI (1989 - saat ini).
- Anggota Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional (1988 - 1996).
- Anggota MPR-RI periode 1982-1987 dan periode (1987 - 2002).
- Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat (1985 - 1998).
- Wakil Rektor IAIN Alauddin (1974 - 1980).
- Pembantu Pimpinan Koordinator Antar Kepolisian Indonesia Timur dalam Bidang Mental (1973 - 1975).
- Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta se Indonesia Timur (Kopertis Wilayah Timur) (1967 - 1980).



Dasar Hukum Pengangkatan

Menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah untuk pertama kalinya melalui hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Perseroan tanggal 23 Maret 2018 dan dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak 10 Januari 2019. Kemudian diangkat kembali sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah untuk kedua kalinya pada Rapat Umum Pemegang Saham 2023 tanggal 16 Maret 2023.



Periode Menjabat

- 23 Maret 2018 - RUPS Tahun 2023, Periode Pertama
- 16 Maret 2023 - RUPS Tahun 2028, Periode Kedua



Jabatan Rangkap

- Pendiri dan Anggota Council of Muslim Elders (2014 - saat ini).
- Anggota Pentashih Al-Qur'an Departemen Agama RI (1989 - saat ini).



Jabatan Rangkap pada Perusahaan Terbuka Lain

Ketua Dewan Pengawas Syariah Unit Usaha Syariah PT Bank CIMB Niaga Tbk (2019 - saat ini).



Kepemilikan Saham BBTN

Per 31 Desember 2023, tidak memiliki saham BBTN



MOHAMMAD BAGUS TEGUH PERWIRA, LC, MA

Anggota Dewan Pengawas Syariah



Warga Negara Indonesia, berusia 45 Tahun Per Desember 2023, berdomisili di Bekasi.



Riwayat Pendidikan

- Sarjana (S1) dari Fakultas Dirasat Islamiyah Wal Arabiyah, Universitas Al-Azhar Kairo-Mesir (1999).
- Pasca Sarjana (S2) Program Studi Ekonomi Islam UIN Syarif Hidayatullah – Jakarta (2007).



Sertifikasi

- Certified Financial Planner (CFP®) (2010).
- Associate Estate Planning Practitioner (AEP®) (2011).
- Qualified Wealth Planner (QWP) (2011).
- Izin sebagai Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (2016).
- Kompetensi Pengawas Syariah - Lembaga Sertifikasi Profesi-Majelis Ulama Indonesia (LSPMUI) (2016).
- Asesor Kompetensi – BNSP (2017).
- Ijtima' Sanawi & Annual Meeting DPS VIII (2023).



Pengalaman Kerja

- Sertifikat Certified Financial Planner (CFP).
- Associate Estate Planning Practitioner (AEP).
- Qualified Wealth Planner (QWP).
- Izin Ahli Syariah Pasar Modal dari OJK.
- Pengawas Syariah – Lembaga Sertifikasi Profesi MUI.
- Anggota Dewan Pengawas Syariah PT Bank Tabungan Negara, Tbk (Persero) (2021 - saat ini).
- Wakil Sekretaris Badan Pelaksana Harian, Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (2020 - saat ini).
- Sekretaris Bidang Pasar Modal Badan Pelaksana Harian, Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (2015 - 2020).
- Ketua Dewan Pengawas Syariah DPLK BRI (2018 - 2019).
- Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Aberdeen Standard Investment Indonesia (2015 - 2021).
- Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Indosurya Asset Management (2015 - 2017).
- Trainer di DSN-MUI Institute (November 2017 - saat ini).
- Anggota Dewan Pengawas Syariah PT Schroder Investment Management Indonesia. (2009 - 2022).
- Dosen Universitas Trisakti (2009 - 2013).
- Head Planner PT Quantum Magna (2007 - 2014).
- Dosen Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka (2007 - 2009).
- Konsultan PT Batasa Tazkia (2004 - 2009).



Dasar Hukum Pengangkatan

Menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah untuk pertama kalinya sejak hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Perseroan tanggal 10 Maret 2021 dan dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak 02 Juni 2021



Periode Menjabat

10 Maret 2021 – RUPS Tahun 2026, Periode Pertama.



Jabatan Rangkap

Anggota Dewan Pengawas Syariah PT Schroder Investment Management Indonesia.



Jabatan Rangkap pada Perusahaan Terbuka Lain

- Anggota Dewan Pengawas Syariah PT OCBC NISP Tbk.
- Anggota Dewan Pengawas Syariah PT Bank Maybank Indonesia Tbk.



Kepemilikan Saham BBTN

Per 31 Desember 2023, tidak memiliki saham BBTN

**MUHAMMAD FAIZ, LC, MA****Anggota Dewan Pengawas Syariah**

Warga Negara Indonesia, berusia 49 Tahun Per Desember 2023, berdomisili di Jakarta.

**Riwayat Pendidikan**

- Sarjana (S1) Fakultas Syariah Islamic University of Madinah, Arab Saudi (1997).
- Master (S2) Fakultas Daarul Ulum Cairo Univeristy, Mesir (1999).

**Sertifikasi**

- Sertifikasi Dewan Pengawas Syariah Level 1 (2008).
- Sertifikasi Dewan Pengawas Syariah Level 2 (2013).

**Pengalaman Kerja**

- Anggota Dewan Pengawas Syariah PT Bank Tabungan Negara, Tbk (Persero) (2023 - saat ini).
- Pengurus Besar (PB) Nahdlatul Ulama (2022- saat ini).
- Wakil Rais PW Nahdlatul Ulama DKI Jakarta (2021-2022).
- Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Syariah (2017-saat ini)
- Ketua Dewan Pengawas Syariah Unit Usaha Syariah PT Bank Permata, Tbk. (2014-saat ini).
- Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Indomobil Multi Finance Indonesia Syariah (2012- saat ini)
- Wakil Sekretaris Komisi Fatwa MUI (2010- saat ini).
- Anggota Dewan Pengawas Syariah Unit Usaha Syariah PT Bank Permata, Tbk. (2008-2014).
- Wakil Pengurus PP Daarul Rahman (2008-sekarang).

**Dasar Hukum Pengangkatan**

Menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah untuk pertama kalinya berdasarkan Surat Keputusan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 18 Oktober 2023 dan dinyatakan efektif sejak 29 November 2023.

**Periode Menjabat**

29 November 2023 - RUPS Tahun 2028, periode pertama

**Jabatan Rangkap**

- Pengurus Besar (PB) Nahdlatul Ulama (2022- saat ini).
- Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Syariah (2017-saat ini)
- Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Indomobil Multi Finance Indonesia Syariah (2012- saat ini)
- Wakil Sekretaris Komisi Fatwa MUI (2010- saat ini).
- Wakil Pengurus PP Daarul Rahman (2008-sekarang).

**Jabatan Rangkap pada Perusahaan Terbuka Lain**

- Ketua Dewan Pengawas Syariah Unit Usaha Syariah PT Bank Permata, Tbk. (2014-saat ini).

**Kepemilikan Saham BBTN**

Per 31 Desember 2023, tidak memiliki saham BBTN



DR. H. MOHAMAD HIDAYAT, MBA, MH*

Anggota Dewan Pengawas Syariah

*Berhenti menjabat sejak 15 Maret 2023 berdasarkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun 2023



Warga Negara Indonesia, berusia 55 Tahun Per Desember 2023, berdomisili di Jakarta.



Riwayat Pendidikan

- Sarjana (S1) Fakultas Syariah dari IAIN Jakarta (1992).
- Master (S2) of Business Administration (MBA) dari IPWI Jakarta.
- Magister (S2) bidang Ilmu Hukum dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Institute at Business Law & Legal Management (IBLAM) Jakarta (2003).
- Doktor (S3) di bidang Islamic Economic and Finance dari Universitas Trisakti, Jakarta (2014).



Sertifikasi

Ijtima' Sanawi & Semiloka DPS-DSM MUI (2019).



Pengalaman Kerja

- Anggota Dewan Pengawas Syariah PT Bank Syariah Indonesia Tbk (2021 – saat ini).
- Anggota DPS Allianz Syariah (2020 - 2023).
- Khatib tetap Masjid OJK (2015 - 2020).
- Pengasuh Ponpes Tahfiz Al Qur'an Al Wasiah Jakarta (2007 - saat ini).
- Anggota Dewan Pengawas Syariah Bank BTN (2005 - saat ini).
- Khatib tetap Masjid Istana Presiden (2005 - 2020).
- Anggota DPS Bank Syariah Mandiri (1999 - 2021).
- Khatib tetap Masjid Bank Indonesia (1999 - 2000).



Dasar Hukum Pengangkatan

Menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah berdasarkan hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Perseroan tanggal 23 Maret 2018.



Periode Menjabat

23 Maret 2018 - 15 Maret 2023, Periode Kedua



Jabatan Rangkap

- Anggota Dewan Pengawas Syariah PT Bank Syariah Indonesia Tbk (2021 – saat ini).
- Pengasuh Ponpes Tahfiz Al Qur'an Al Wasiah Jakarta (2007 - saat ini).
- Anggota Dewan Pengawas Syariah Bank BTN (2005 - saat ini).



Jabatan Rangkap pada Perusahaan Terbuka Lain

Tidak memiliki rangkap jabatan pada perusahaan terbuka lain.



Kepemilikan Saham BBTN

Per 31 Desember 2023, tidak memiliki saham BBTN

Hubungan Afiliasi Anggota Dewan Pengawas Syariah

Tabel Hubungan Afiliasi Dewan Pengawas Syariah

Hubungan Keuangan, Keluarga dan Kepengurusan Dewan Pengawas Syariah															
Nama	Jabatan	Hubungan Keuangan Dengan						Hubungan Keluarga Dengan						Hubungan Kepengurusan	
		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali			
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Prof. Dr. H. Muhammad Quraish Shihab, MA	Ketua Dewan Pengawas Syariah		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Mohammad Bagus Teguh Perwira, Lc, MA	Anggota Dewan Pengawas Syariah		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Muhammad Faiz, Lc. MA	Anggota Dewan Penaawas Syariah		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓

Perubahan Komposisi Anggota Dewan Pengawas Syariah dan Alasan Perubahannya

Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah Perseroan telah berdasarkan pada persyaratan Dewan Pengawas Syariah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 15/14/PBI/2013 yaitu Anggota Dewan Pengawas Syariah harus memiliki integritas, kompetensi dan reputasi dalam bidang keuangan. Seluruh Dewan Pengawas Syariah berdomisili di wilayah kerja Kantor Pusat BTN. Selama tahun 2023, telah terjadi perubahan komposisi anggota Dewan Pengawas Syariah. Perubahan komposisi anggota Dewan Pengawas Syariah dilakukan berdasarkan kebutuhan Perseroan. Perubahan komposisi anggota Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut:

Komposisi Dewan Pengawas Syariah Periode 1 Januari 2023 – 15 Maret 2023

Komposisi Dewan Pengawas Syariah periode 1 Januari 2023 sampai dengan 15 Maret 2023 sebanyak 3 (tiga) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua Dewan Pengawas Syariah dan 2 (dua) orang Anggota Dewan Pengawas Syariah. Komposisi dan dasar pengangkatan Dewan Pengawas Syariah dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel Komposisi dan Dasar Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah Periode 1 Januari 2023 – 15 Maret 2023

Nama	Jabatan	Pelaksana	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif
Prof. Dr. H. Muhammad Quraish Shihab, MA	Ketua	OJK	RUPS Tahunan tanggal 23 Maret 2018	10 Januari 2019
Dr. H. Mohammad Hidayat, MBA, MH	Anggota	OJK	RUPS Tahunan tanggal 23 Maret 2018	-
Mohamad Bagus Teguh Perwira, Lc, MA	Anggota	OJK	RUPS Tahunan tanggal 10 Maret 2021	2 Juni 2021

Komposisi Dewan Pengawas Syariah Periode 16 Maret 2023 – 17 Oktober 2023

Pada tanggal 16 Maret 2023, Rapat Umum Pemegang Saham mensahkan pemberhentian Prof. Dr. H. Muhammad Quraish Shihab dari Ketua Umum DPS dan Dr. H. Mohamad Hidayat, MBA, MH dari anggota DPS. Kemudian, RUPS menyetujui dan mengesahkan pengangkatan kembali Muhammad Quraish Shihab sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk periode kedua. Sehingga komposisi Dewan Pengawas Syariah periode 16 Maret 2023 sampai dengan 17 Oktober 2023 sebanyak 2 (dua) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua Dewan Pengawas Syariah dan 1 (satu) orang Anggota Dewan Pengawas Syariah. Komposisi dan dasar pengangkatan Dewan Pengawas Syariah dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel Komposisi dan Dasar Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah Periode 16 Maret 2023 – 17 Oktober 2023

Nama	Jabatan	Pelaksana	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif
Prof. Dr. H. Muhammad Quraish Shihab, MA	Ketua	OJK	- RUPS Tahunan tanggal 23 Maret 2018 - RUPS Tahunan tanggal 16 Maret 2023	- 10 Januari 2019 - 16 Maret 2023
Mohammad Bagus Teguh Perwira, Lc, MA	Anggota	OJK	RUPS Tahunan tanggal 10 Maret 2021	2 Juni 2021



Komposisi Dewan Pengawas Syariah Periode 18 Oktober 2023 – 31 Desember 2023

Pada tanggal 18 Oktober 2023, Muhammad Faiz, Lc, MA diangkat sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah. Sehingga komposisi Dewan Pengawas Syariah periode 18 Oktober 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebanyak 3 (tiga) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua Dewan Pengawas Syariah dan 2 (dua) orang Anggota Dewan Pengawas Syariah. Komposisi dan dasar pengangkatan Dewan Pengawas Syariah dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel Komposisi dan Dasar Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah Periode 18 Oktober 2023 – 31 Desember 2023

Nama	Jabatan	Pelaksana	Dasar Pengangkatan	Tanggal Efektif
Prof. Dr. H. Muhammad Quraish Shihab, MA	Ketua	OJK	- RUPS Tahunan tanggal 23 Maret 2018 - RUPS Tahunan tanggal 16 Maret 2023	- 10 Januari 2019 - 16 Maret 2023
Mohammad Bagus Teguh Perwira, Lc, MA	Anggota	OJK	RUPS Tahunan tanggal 10 Maret 2021	2 Juni 2021
Muhammad Faiz, Lc, MA	Anggota	OJK	Surat Keputusan OJK tanggal 18 Oktober 2023	29 November 2023

Profil Pejabat Eksekutif

Senior Executive Vice President



BENNY YOSLIM

SEVP Wholesale Banking

Warga Negara Indonesia, berusia 43 Tahun Per Desember 2023, berdomisili di Jakarta Barat.



Riwayat Pendidikan

- Sarjana (S1) Teknik Industri, Universitas Trisakti, Jakarta (2002).
- Master (S2) Business Administration, Institut Teknologi Bandung, Bandung (2005).



Sertifikasi

Manajemen Risiko Perbankan Level 5 oleh BSMR (*Refreshment* 2020).



Pengalaman Kerja

- SEVP Wholesale Banking Bank BTN (Maret 2021 – saat ini).
- Corporate Banking Director PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2020).
- General Manager, Local Corporate & Multinational Company 1 Division PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2018 – 2020).
- Deputy GM, BUMN & Government Institution Division PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2016 – 2017).
- Team Leader, BUMN & Government Institution Division PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2013 – 2016).



Dasar Hukum Pengangkatan

Menjabat sebagai SEVP Perseroan untuk pertama kalinya sejak 01 Maret 2021 berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan Nomor 248/DIR/2021 tanggal 03 Maret 2021.



Kepemilikan Saham BBTN

Per 31 Desember 2023, memiliki 501.200 lembar saham/0,0035712%



ALEX SOFJAN NOOR

SEVP Operations

Warga Negara Indonesia, berusia 57 Tahun Per Desember 2023, berdomisili di Jakarta Barat.



Riwayat Pendidikan

Sarjana (S1) Ekonomi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta (1991).



Sertifikasi

- *General Banking Refreshment Level 3* oleh LPPI (2022).
- *International Risk Management Refreshment & Wealth Management Certification Program* oleh MMUGM dan IBI (2022).



Pengalaman Kerja

- SEVP Operations Bank BTN (Juni 2022 – saat ini).
- SEVP Human Capital Bank BTN (Januari 2022 – Juni 2022).
- Sharia Business Division Head Bank BTN (2020 – Januari 2022).
- Sharia Division Head Bank BTN (2019 – 2020).
- Commercial Risk Division Head Bank BTN (2018 – 2019).



Dasar Hukum Pengangkatan

Menjabat sebagai SEVP Perseroan untuk pertama kalinya sejak 03 Januari 2022 berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan Nomor 06/DIR/2022 tanggal 04 Januari 2022.



Kepemilikan Saham BBTN

Per 31 Desember 2023, memiliki 1.129.726 lembar saham/0,0080497%

Sampai dengan 31 Desember 2023, posisi SEVP Compliance & Legal masih belum terisi. Supervisi unit kerja SEVP Compliance & Legal berada pada Direktur Human Capital, Compliance & Legal sampai dengan ditunjuknya SEVP Compliance & Legal.



Profil Pejabat Satu Level Di Bawah Direksi



Hendratno Tri Wibowo

Internal Audit Division Head

Warga Negara Indonesia, berusia 49 Tahun,
berdomisili di Tangerang Selatan.



■ Riwayat Pendidikan

- Magister (S-2) Akuntansi dari University of Queensland Tahun 2003
- Sarjana (S-1) Akuntansi dari Universitas Indonesia Tahun 1998
- Diploma (D-3) Akuntansi dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) Tahun 1995



■ Pengalaman Kerja

- 2021 menjabat sebagai *Internal Audit Division Head* Perseroan



■ Periode Menjabat

Menjabat sejak: 26 Juli 2021



Sindhu Rahadian Ardita

Treasury Division Head

Warga Negara Indonesia, berusia 50 tahun,
berdomisili di Jakarta Pusat.



■ Riwayat Pendidikan

- Magister (S-2) Manajemen Keuangan dari UGM & University of Kentucky USA Tahun 2004.
- Sarjana (S-1) Akuntansi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAI Tahun 1995.



■ Pengalaman Kerja

- 2021 menjabat sebagai Treasury Division Head
- 2019 menjabat sebagai Corporate Syndication & Transaction Banking Division Head
- 2017 menjabat sebagai Corporate & Syndication Loan Division Head
- 2015 menjabat sebagai Institutional Banking Division Head



■ Periode Menjabat

Menjabat sejak: 01 April 2021



Ferry Sipahutar

Service Quality & Distribution Division Head

Warga Negara Indonesia, berusia 53 tahun,
berdomisili di Bogor.



■ Riwayat Pendidikan

- Magister (S-2) Manajemen Keuangan dari UGM & University of Kentucky USA Tahun 2004
- Sarjana (S1) Teknologi Mineral dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta Tahun 1993



■ Pengalaman Kerja

- 2023 menjabat sebagai Service Quality & Distribution Division Head
- 2021 menjabat sebagai Retail Funding & Services Division Head
- 2021 menjabat sebagai Regional Office Head I (Jawa Barat)
- 2020 menjabat sebagai Regional Office Head VI (Jawa Tengah)
- 2018 menjabat sebagai Retail Funding & Services Division Head



■ Periode Menjabat

Menjabat sejak: 05 Juni 2023



Farida Andriani W

Marketing Communication Division Head

Warga Negara Indonesia, berusia 53 tahun, berdomisili di Jakarta.



Riwayat Pendidikan

Sarjana (S-1) Pertanian dari Universitas Jenderal Soedirman Tahun 1994



Pengalaman Kerja

- 2023 menjabat sebagai Marketing Communication Division Head
- 2020 menjabat sebagai Branding & Product Marketing Department Head



Periode Menjabat

Menjabat sejak: 14 April 2023



Ramon Armando

Corporate Secretary Division Head

Warga Negara Indonesia, berusia 49 tahun, berdomisili di Jakarta.



Riwayat Pendidikan

- Magister (S-2) Perdagangan dari The University of Sydney Tahun 1998
- Administrasi Niaga dari Universitas Indonesia Tahun 1996



Pengalaman Kerja

- 2023 menjabat sebagai Corporate Secretary Division Head
- 2020 menjabat sebagai Marketing Communication Division Head
- 2020 merangkap sebagai Digital Channel Division Head



Periode Menjabat

Menjabat sejak: 14 April 2023



Rahmayati

Human Capital Management Division

Warga Negara Indonesia, berusia 50 tahun, berdomisili di Jakarta.



Riwayat Pendidikan

- Magister (S-2) *Business Administration* dari Institut Teknologi Bandung Tahun 2012
- Sarjana (S-1) Teknik Sipil dari Universitas Hasanuddin Tahun 1996



Pengalaman Kerja

- 2022 menjabat sebagai Human Capital Management Division
- 2021 menjabat sebagai Sharia Funding & Treasury Deputy
- 2021 menjabat sebagai Sharia Business Deputy
- 2016 menjabat sebagai Branch Manager Sharia Jakarta Pasar Minggu



Periode Menjabat

Menjabat sejak: 14 Februari 2022



Aloysius Wilhelmus Junior Bakowatun

Human Capital Business Partner Division Head

Warga Negara Indonesia, berusia 52 tahun,
berdomisili di Jakarta.



Riwayat Pendidikan

- Magister (S-2) Manajemen SDM dari Sekolah Tinggi Manajemen PPM Tahun 2003
- Sarjana (S-1) Hama Penyakit Tanaman dari Institut Pertanian Bogor Tahun 1996



Pengalaman Kerja

- 2023 menjabat sebagai Human Capital Business Partner Division Head
- 2021 menjabat sebagai Human Capital Strategy Division Head



Periode Menjabat

Menjabat sejak: 01 November 2023



Aldo Bimantoro

Human Capital Strategy Division Head

Warga Negara Indonesia, berusia 33 tahun,
berdomisili di Jakarta.



Riwayat Pendidikan

- Magister (S-2) Manajemen SDM dan Organisasi dari The London School of Economics & Political Science Tahun 2021
- Sarjana (S-1) Teknologi Industri Pertanian dari Institut Pertanian Bogor Tahun 2012



Pengalaman Kerja

- 2023 menjabat sebagai Human Capital Strategy Division Head



Periode Menjabat

Menjabat sejak: 06 November 2023



Ade Surya Lesmana

Learning Management Division Head

Warga Negara Indonesia, berusia 51 tahun,
berdomisili di Tangerang Selatan.



Riwayat Pendidikan

- Magister (S-2) Manajemen dari Institut Keuangan Perbankan dan Informatika Asia Perbanas Tahun 2009
- Sarjana (S-1) Ekonomi dari Universitas Padjadjaran Tahun 1996



Pengalaman Kerja

- 2023 menjabat sebagai Learning Management Division Head
- 2022 menjabat sebagai PJ Learning Management Division Head
- 2022 menjabat sebagai PJ Learning Center Division Head
- 2021 menjabat sebagai Employee Development Department Head



Periode Menjabat

Menjabat sejak: 01 Februari 2023



Wilson Arafat

Enterprise Risk Management Division Head dan
Plt. Transformation & Partnership Management
Division Head

Warga Negara Indonesia, berusia 51 tahun,
berdomisili di Jakarta Barat.



Riwayat Pendidikan

- Magister (S-2) Manajemen Pemasaran dari Universitas Gadjah Mada Tahun 2004
- Sarjana (S-1) Ekonomi Pembangunan dari Universitas Gadjah Mada Tahun 1996



Pengalaman Kerja

- 2023 menjabat sebagai PLT Transformation Management Division Head
- 2021 menjabat sebagai Enterprise Risk Management Division Head
- 2019 menjabat sebagai Procurement & General Services Division Head



Periode Menjabat

Menjabat sejak: 02 Juni 2021



Joko Christianto

IT Strategic Planning & Development Division Head

Warga Negara Indonesia, berusia 43 tahun,
berdomisili di Jakarta.



Riwayat Pendidikan

Sarjana (S-1) Ilmu Komputer dari Universitas Gadjah Mada Tahun 2003



Pengalaman Kerja

2021 menjabat sebagai IT Strategic Planning & Development Division Head



Periode Menjabat

Menjabat sejak: 29 Juli 2021



Danny Sutanto

PJ IT Operations Division Head

Warga Negara Indonesia, berusia 54 tahun,
berdomisili di Jakarta.



Riwayat Pendidikan

- Magister (S-2) Teknik Elektro dari Institut Teknologi Bandung Tahun 1996
- Sarjana (S-1) Teknik Elektro dari Institut Teknologi Bandung Tahun 1993



Pengalaman Kerja

- 2023 menjabat sebagai PJ IT Operations Division Head
- 2021 menjabat sebagai Deputy IT Strategic Planning & Development



Periode Menjabat

Menjabat sejak: 03 Agustus 2023



Budi Hariyanto

IT Security Division Head

Warga Negara Indonesia, berusia 43 tahun, berdomisili di Jakarta.



Riwayat Pendidikan

Sarjana (S-1) Teknik Elektro dari Institut Teknologi Bandung Tahun 2003



Pengalaman Kerja

2022 menjabat sebagai IT Security Division Head



Periode Menjabat

Menjabat sejak: 15 Desember 2022



Wahyudi Joko Santoso

Procurement & Fixed Asset Management
Division Head

Warga Negara Indonesia, berusia 52 tahun, berdomisili di Bekasi.



Riwayat Pendidikan

- Magister (S-2) Manajemen dari STIE Indonesia Banking School Tahun 2019
- Sarjana (S-1) Ekonomi Manajemen dari Universitas Jenderal Soedirman Tahun 1995



Pengalaman Kerja

- 2023 menjabat sebagai Procurement & Fixed Asset Management Division Head
- 2021 menjabat sebagai IT Operations Division Head
- 2019 menjabat sebagai PJ. IT Operations Division Head



Periode Menjabat

Menjabat sejak: 03 Agustus 2023



Adee Indriana D

Operations & Business Support Division Head

Warga Negara Indonesia, berusia 51 tahun, berdomisili di Bekasi.



Riwayat Pendidikan

Sarjana (S-1) Ekonomi Pembangunan dari Universitas Sebelas Maret Tahun 1995



Pengalaman Kerja

- 2018 menjabat sebagai Operations & Business Support Division Head
- 2017 menjabat sebagai PLT Operation & Business Support Division Head
- 2016 menjabat sebagai Digital Banking Development Department Head



Periode Menjabat

Menjabat sejak: 02 April 2018



Eko Hapsoro Susilo

Customer Care Division Head

Warga Negara Indonesia, berusia 50 tahun, berdomisili di Tangerang Selatan.



Riwayat Pendidikan

- Magister (S-2) Manajemen dari Universitas Gadjah Mada Tahun 2004
- Sarjana (S-1) Teknik Arsitektur dari Universitas Diponegoro Tahun 1996



Pengalaman Kerja

- 2022 menjabat sebagai Customer Care Division Head
- 2020 menjabat sebagai Corporate Communication Department Head



Periode Menjabat

Menjabat sejak: 26 Desember 2022



Fatoni Hudhori

Finance & Accounting Division Head

Warga Negara Indonesia, berusia 51 tahun, berdomisili di Jakarta.



Riwayat Pendidikan

Sarjana (S-1) Akuntansi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dr Moechtar Talib Tahun 1995



Pengalaman Kerja

- 2023 menjabat sebagai Finance & Accounting Division Head
- 2022 menjabat sebagai PJ Finance & Accounting Division Head



Periode Menjabat

Menjabat sejak: 01 Februari 2023



Abdul Firman

Sharia Banking Division Head

Warga Negara Indonesia, berusia 51 tahun, berdomisili di Bekasi.



Riwayat Pendidikan

Sarjana (S-1) Teknik Sipil dari Institut Teknologi Bandung Tahun 1995



Pengalaman Kerja

- 2022 menjabat sebagai Sharia Banking Division Head
- 2021 menjabat sebagai Human Capital Management Division Head
- 2020 menjabat sebagai Commercial Business Centre Head



Periode Menjabat

Menjabat sejak: 03 Januari 2022



R. Wahyu B. Witjaksono

Compliance & Governance Division Head

Warga Negara Indonesia, berusia 53 tahun, berdomisili di Bekasi.



Riwayat Pendidikan

- Magister (S-2) Manajemen Keuangan dari UGM & University of Kentucky USA Tahun 2004
- Sarjana (S-1) Akuntansi dari Universitas Padjadjaran Tahun 1993



Pengalaman Kerja

- 2019 menjabat sebagai Compliance & Governance Division Head
- 2018 menjabat sebagai PLT Compliance & Governance Division Head
- 2018 menjabat sebagai Deputy Internal Audit Division Head



Periode Menjabat

Menjabat sejak: 05 September 2019



Tan Jacky Chen

Digital Banking Division Head

Warga Negara Indonesia, berusia 40 tahun, berdomisili di Tangerang.



Riwayat Pendidikan

- Magister (S-2) Magister Manajemen, Universitas Bina Nusantara Tahun 2006
- Sarjana (S-1) Ilmu Komputer dari Universitas Bina Nusantara Tahun 2001



Pengalaman Kerja

- 2021 menjabat sebagai Digital Channel Division Head



Periode Menjabat

Menjabat sejak: 16 Juli 2021



Sri Astuti

Commercial Banking Division Head

Warga Negara Indonesia, berusia 50 tahun, berdomisili di Jakarta.



Riwayat Pendidikan

Sarjana (S-1) Ekonomi dari Universitas Islam Indonesia Tahun 1995



Pengalaman Kerja

- 2020 menjabat sebagai Commercial Banking Division Head
- 2018 menjabat sebagai Corporate & Loan Syndication Department Head



Periode Menjabat

Menjabat sejak: 31 Desember 2019



Ricky RS. Pattinggi

Corporate Banking Division Head

Warga Negara Indonesia, berusia 52 tahun, berdomisili di Bogor.



Riwayat Pendidikan

Sarjana (S-1) Manajemen dari Universitas Bandar Lampung Tahun 1994



Pengalaman Kerja

- 2021 menjabat sebagai Corporate Syndication & Transaction Banking Division Head
- 2021 menjabat sebagai Plt. Internal Audit Division Head
- 2020 menjabat sebagai Deputy Internal Audit Division Head
- 2018 menjabat sebagai Deputy Regional Manager Regional Office 2
- 2017 menjabat sebagai Branch Manager Bandung
- 2015 menjabat sebagai Branch Manager Malang



Periode Menjabat

Menjabat sejak: 26 Juli 2021



Erwinta Siswadi

Institutional Funding Division Head

Warga Negara Indonesia, berusia 52 tahun, berdomisili di Tangerang Selatan.



Riwayat Pendidikan

Sarjana (S-1) Teknik Industri dari Universitas Sumatera Utara Tahun 1996



Pengalaman Kerja

- 2022 menjabat sebagai Institutional Funding Division Head
- 2021 menjabat sebagai PJ Institutional Funding Division Head



Periode Menjabat

Menjabat sejak: 01 Januari 2022



Wilson Lie Simatupang

Legal Division Head

Warga Negara Indonesia, berusia 55 tahun, berdomisili di Bogor.



Riwayat Pendidikan

- Magister (S-2) Hukum Ekonomi dari Universitas Indonesia Tahun 2003
- Sarjana (S-1) Hukum dari Universitas Sumatera Utara Tahun 1994



Pengalaman Kerja

- 2023 menjabat sebagai Legal Division Head
- 2022 menjabat sebagai PJ Legal Division Head
- 2021 menjabat sebagai Plt. Legal Division Head



Periode Menjabat

Menjabat sejak: 01 Februari 2023



**I Gusti Agung Komang
Tri Martha W**

Credit Operations Division Head

Warga Negara Indonesia, berusia 54 tahun,
berdomisili di Jakarta.



Riwayat Pendidikan

Sarjana (S-1) Hukum dari Universitas Udayana Tahun 1993



Pengalaman Kerja

- 2021 menjabat sebagai Credit Operations Division Head
- 2021 menjabat sebagai PJ Credit Operations Division Head
- 2019 menjabat sebagai Branch Manager Bekasi
- 2018 menjabat sebagai Deputy Regional Manager Business, Regional Office III (Jawa Timur)



Periode Menjabat

Menjabat sejak: 16 Agustus 2021



Frengky Rosadrian Perangin-Angin

Wealth Management Division Head dan
Plt. Retail Funding Division Head

Warga Negara Indonesia, berusia 48 tahun,
berdomisili di Jakarta.



Riwayat Pendidikan

Sarjana (S-1) Finance & Economics dari University of Oregon Tahun 1996



Pengalaman Kerja

- 2020 menjabat sebagai Wealth Management Division Head



Periode Menjabat

Menjabat sejak: 17 Desember 2020



Mochamad Yut Penta

Non-Subsidized Mortgage Division Head

Warga Negara Indonesia, berusia 53 tahun,
berdomisili di Jakarta.



Riwayat Pendidikan

- Magister (S-2) Manajemen dari Universitas Gadjah Mada Tahun 2004
- Sarjana (S-1) Ekonomi Pembangunan dari Universitas Padjadjaran Tahun 1995



Pengalaman Kerja

- 2023 menjabat sebagai Non-Subsidized Mortgage Division Head
- 2019 menjabat sebagai Roll Out Transformation Project Lead



Periode Menjabat

Menjabat sejak: 01 Februari 2023



Nurkholis Wahyudi

Personal Banking Division Head

Warga Negara Indonesia, berusia 47 tahun, berdomisili di Jakarta.



Riwayat Pendidikan

Sarjana (S-1) Sosial Ekonomi Perikanan dari Universitas Brawijaya Tahun 2000



Pengalaman Kerja

- 2023 menjabat sebagai Personal Banking Division Head



Periode Menjabat

Menjabat sejak: 09 Agustus 2023



Budi Permana

Subsidized Mortgage Division Head

Warga Negara Indonesia, berusia 51 tahun, berdomisili di Jakarta.



Riwayat Pendidikan

Sarjana (S-1) Ekonomi dari Universitas Syiah Kuala Tahun 1997



Pengalaman Kerja

- 2023 menjabat sebagai Subsidized Mortgage Division Head
- 2021 menjabat sebagai Small Medium Enterprise Banking Division Head
- 2020 menjabat sebagai Retail Credit Risk Division Head
- 2020 menjabat sebagai Consumer Collection, Recovery & Asset Sales Division Head



Periode Menjabat

Menjabat sejak: 01 November 2023



Roganda S.M. Siahaan

Small Medium Enterprise Banking Division Head

Warga Negara Indonesia, berusia 53 tahun, berdomisili di Tangerang.



Riwayat Pendidikan

Sarjana (S-1) Teknik Sipil dari Universitas Sumatera Utara Tahun 1996



Pengalaman Kerja

- 2023 menjabat sebagai Small Medium Enterprise Banking Division Head
- 2023 menjabat sebagai Deputy Subsidized Mortgage Division
- 2023 menjabat sebagai Branch Manager KC Bekasi
- 2020 menjabat sebagai Branch Manager KC Tangerang



Periode Menjabat

Menjabat sejak: 01 November 2023



Hasta Nugraha Utomo

Financial Institution &
Capital Market Division Head

Warga Negara Indonesia, berusia 51 tahun,
berdomisili di Tangerang.



Riwayat Pendidikan

- Magister (S-2) Manajemen Keuangan dari UGM & University of Kentucky USA Tahun 2004
- Sarjana (S-1) Hukum dari Universitas Wijaya Kusuma Purwokerto Tahun 1995



Pengalaman Kerja

2021 menjabat sebagai Financial Institution & Capital Market Division Head



Periode Menjabat

Menjabat sejak: 01 April 2021



Erwin Dwi Kusuma

Consumer Collection Recovery & Asset Sales 1
Division Head

Warga Negara Indonesia, berusia 44 tahun,
berdomisili di Jakarta.



Riwayat Pendidikan

- Magister (S-2) *Master of Business Administration* dari Universitas Gadjah Mada Tahun 2023
- Sarjana (S-1) Teknik Sipil dari Institut Teknologi Sepuluh November Tahun 2002



Pengalaman Kerja

- 2023 menjabat sebagai Consumer Collection Recovery & Asset Sales 1 Division Head
- 2020 menjabat sebagai Transformation & Partnership Management Division Head
- 2019 menjabat sebagai Enterprise Risk Management Division Head
- 2017 menjabat sebagai Retail Risk Division Head



Periode Menjabat

Menjabat sejak: 05 Juni 2023



Nurwidi Purboyo

Consumer Collection Recovery & Asset Sales 2
Division Head

Warga Negara Indonesia, berusia 54 tahun,
berdomisili di Jakarta.



Riwayat Pendidikan

Sarjana (S-1) Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan dari Universitas Airlangga Tahun 1992



Pengalaman Kerja

- 2023 menjabat sebagai Consumer Collection Recovery & Asset Sales 2 Division Head
- 2021 menjabat sebagai Consumer Collection, Recovery & Asset Sales Division Head
- 2020 menjabat sebagai PJ Regional Office Head IV (Sumatera)
- 2019 menjabat sebagai Deputy Regional Manager Support, Regional Office III (Jawa Timur)



Periode Menjabat

Menjabat sejak: 05 Juni 2023



Ari Kurniawan

Commercial Asset Management Division Head

Warga Negara Indonesia, berusia 51 tahun, berdomisili di Jakarta.



Riwayat Pendidikan

Sarjana (S-1) Hukum dari Universitas Padjadjaran Tahun 1996



Pengalaman Kerja

- 2023 menjabat sebagai Commercial Asset Management Division Head
- 2022 menjabat sebagai Commercial Asset Management 1 Division Head
- 2020 menjabat sebagai Corporate Secretary Division Head
- 2019 menjabat sebagai Branch Manager Jakarta Cawang
- 2017 menjabat Deputy Branch Manager Bandung



Periode Menjabat

Menjabat sejak: 05 Juni 2023



Kusumarjono

Corporate Strategy & Planning Division Head

Warga Negara Indonesia, berusia 55 tahun, berdomisili di Jakarta.



Riwayat Pendidikan

Sarjana (S-1) Ekonomi Pembangunan dari Universitas Lampung Tahun 1990



Pengalaman Kerja

- 2021 menjabat sebagai Corporate Strategy & Planning Division Head
- 2020 menjabat sebagai Retail Funding & Services Division Head



Periode Menjabat

Menjabat sejak: 19 Juli 2021



Winang Budoyo

Investor Relations & Research Division Head

Warga Negara Indonesia, berusia 54 tahun, berdomisili di Tangerang.



Riwayat Pendidikan

- Magister (S-2) *Master of Economic Studies* dari University of Queensland Australia Tahun 2002
- Sarjana (S-1) Ekonomi dari Universitas Indonesia Tahun 1996



Pengalaman Kerja

- 2020 menjabat sebagai Investor Relations & Research Division Head dan Chief Economist
- 2018 menjabat sebagai Investor Relations Department Head dan Chief Economist



Periode Menjabat

Menjabat sejak: 28 Januari 2020



Beki Kanuwa

Retail Credit Risk Division Head

Warga Negara Indonesia, berusia 50 tahun, berdomisili di Jakarta.



Riwayat Pendidikan

Sarjana (S-1) Teknik Lingkungan dari Institut Teknologi Bandung Tahun 1996



Pengalaman Kerja

- 2021 menjabat sebagai Retail Credit Risk Division Head
- 2018 menjabat sebagai Corporate Strategy & Performance Management Division Head



Periode Menjabat

Menjabat sejak: 01 Juli 2021



Henri Ari Wibawa

Wholesale Credit Risk Division Head

Warga Negara Indonesia, berusia 52 tahun, berdomisili di Jakarta.



Riwayat Pendidikan

Sarjana (S-1) Teknologi Pertanian dari Universitas Gadjah Mada Tahun 1996



Pengalaman Kerja

- 2023 menjabat sebagai Wholesale Credit Risk Division Head
- 2021 menjabat sebagai Commercial Risk Division Head
- 2020 menjabat sebagai Branch Manager Jakarta Cawang
- 2018 menjabat sebagai Branch Manager Ciputat



Periode Menjabat

Menjabat sejak: 03 Agustus 2023



L. Esti Dwi Retnosari

Policy & Procedure Division Head

Warga Negara Indonesia, berusia 54 tahun, berdomisili di Bekasi.



Riwayat Pendidikan

- Master (S-2) of Business Administration dari Universitas Gadjah Mada Tahun 2019
- Sarjana (S-1) Teknik Industri dari Universitas Pasundan Tahun 1994



Pengalaman Kerja

- 2021 menjabat sebagai Policy & Procedure Division Head
- 2019 menjabat sebagai Policy, Procedure & BPR Division Head
- 2019 menjabat sebagai Policy & Procedure Desk Head
- 2018 menjabat sebagai PLT. Policy & Procedure Desk Head



Periode Menjabat

Menjabat sejak: 16 September 2019



Indra Hidayatullah

Data Management & Analytics Division Head

Warga Negara Indonesia, berusia 47 tahun, berdomisili di Tangerang Selatan.



Riwayat Pendidikan

Sarjana (S-1) Fisika dari Institut Teknologi Bandung Tahun 2001



Pengalaman Kerja

- 2021 menjabat sebagai Data Management & Analytics Division Head



Periode Menjabat

Menjabat sejak: 01 Mei 2021



Teddy Yunirman Danas

Wholesale Transaction Division Head*

Warga Negara Indonesia, berusia 57 tahun, berdomisili di Tangerang Selatan.



Riwayat Pendidikan

- Magister (S-2) Manajemen Keuangan dari Institut Pertanian Bogor Tahun 1997
- Sarjana (S-1) Ilmu Tanah dari Institut Pertanian Bogor Tahun 1990



Pengalaman Kerja

- 2022 menjabat sebagai Wholesale Transaction Division Head



Periode Menjabat

Menjabat sejak: 01 November 2022

*) Berhenti menjabat terhitung sejak tanggal 20 Desember 2023



Benjamen Sihombing

Regional Office Head I (Jawa Barat)

Warga Negara Indonesia, berusia 54 tahun, berdomisili di Bekasi.



Riwayat Pendidikan

Sarjana (S-1) Manajemen dari Universitas Sumatera Utara Tahun 1993



Pengalaman Kerja

- 2022 menjabat sebagai Regional Office Head I (Jawa Barat)
- 2021 menjabat sebagai Commercial Asset Management 1 Division Head
- 2020 menjabat sebagai PJ Commercial Risk Division Head
- 2019 menjabat sebagai PJ Regional Office Head IV (Sumatera)
- 2018 menjabat sebagai Branch Manager Bekasi



Periode Menjabat

Menjabat sejak: 11 Juli 2022



Iriska Dewayani E

Regional Office Head II (Jakarta)

Warga Negara Indonesia, berusia 55 tahun, berdomisili di Jakarta.



Riwayat Pendidikan

Sarjana (S-1) Ekonomi Manajemen dari UPN Veteran Tahun 1992



Pengalaman Kerja

- 2023 menjabat sebagai Regional Office Head II (Jakarta)
- 2022 menjabat sebagai Non Subsidized Mortgage & Personal Lending Division Head
- 2021 menjabat sebagai Regional Office Head III (Jawa Timur)
- 2020 menjabat sebagai Branch Manager Jakarta Harmoni
- 2018 menjabat sebagai Branch Manager Jakarta Kuningan



Periode Menjabat

Menjabat sejak: 01 Februari 2023



Yenny Herlina

Regional Office Head III (Jawa Timur, Bali, & Nusa Tenggara)

Warga Negara Indonesia, berusia 51 tahun, berdomisili di Surabaya.



Riwayat Pendidikan

Sarjana (S-1) Ekonomi dari Universitas Jenderal Soedirman Tahun 1996



Pengalaman Kerja

- 2022 menjabat sebagai DRM Business Regional Office III (Jawa Timur)
- 2020 menjabat sebagai DRM Support Regional Office III (Jawa Timur)
- 2019 menjabat sebagai Accounting Policy, Planning & Service Department Head



Periode Menjabat

Menjabat sejak: 01 Februari 2023



M. Amin Sholeh

Regional Office Head IV (Sumatera)

Warga Negara Indonesia, berusia 54 tahun, berdomisili di Medan.



Riwayat Pendidikan

Sarjana (S-1) Ekonomi Akuntansi dari Universitas Sebelas Maret Tahun 1993



Pengalaman Kerja

- 2021 menjabat sebagai Regional Office Head IV (Sumatera)
- 2021 menjabat sebagai Branch Manager KC Makassar
- 2019 menjabat sebagai Commercial Asset Management 1 Division Head
- 2018 menjabat sebagai Branch Manager KC Banjarmasin



Periode Menjabat

Menjabat sejak: 19 Juli 2021



Dasar Hukum Pengangkatan

SK No. 596/DIR/2021



Paulus HES

Regional Office Head V (Kalimantan, Sulawesi, Maluku, & Papua)

Warga Negara Indonesia, berusia 52 tahun, berdomisili di Makassar.



Riwayat Pendidikan

Sarjana (S-1) Teknik Pertambangan dari Institut Teknologi Bandung Tahun 1995



Pengalaman Kerja

- 2023 menjabat sebagai Regional Office Head V (Sulawesi)
- 2021 menjabat sebagai Commercial Asset Management 2 Division Head
- 2020 menjabat sebagai PLT Regional Office Head III (Jawa Timur)
- 2019 menjabat sebagai Deputy Regional Manager Business, Regional Office III (Jawa Timur)



Periode Menjabat

Menjabat sejak: 05 Juni 2023



Harman Soesanto

Regional Office Head VI (Jawa Tengah dan DIY)

Warga Negara Indonesia, berusia 53 tahun, berdomisili di Semarang.



Riwayat Pendidikan

- Magister (S-2) Manajemen dari Universitas Indonesia Tahun 2005
- Sarjana (S-1) Manajemen dari Universitas Brawijaya Tahun 1996



Pengalaman Kerja

- 2023 menjabat sebagai Regional Office Head VI (Jawa Tengah)
- 2022 menjabat sebagai Regional Office Head V (Sulawesi)
- 2021 menjabat sebagai Deputy Regional Manager Business, Regional Office V (Sulawesi)
- 2020 menjabat sebagai Branch Manager KC Surabaya
- 2018 menjabat sebagai Branch Manager KC Denpasar



Periode Menjabat

Menjabat sejak: 05 Juni 2023

Pejabat Dua Level di Bawah Direksi

Nama	Unit Kerja	Job Title
DIVISI		
Waluyo	Commercial Asset Management Division	Deputy Commercial Asset Management Division Head
Achmad Zuchridin	Commercial Banking Division	Deputy Commercial Banking Division Head
Lysmauli Siregar	Credit Operations Division	Deputy Credit Operations Division Head
Lusiana Anjarsari	Internal Audit Division	Deputy Internal Audit Division Head
Moh. Iwan Somantri	IT Operations Division	Deputy IT Operations Division Head
Ghulam Mahdi Muharram	IT Strategic Planning & Development Division	Deputy IT Strategic Planning & Development Division Head
Dedy Lesmana	Non-Subsidized Mortgage Division	Deputy Non-Subsidized Mortgage Division Head
Muhamad Irwan	Operations & Business Support Division	Deputy Operations & Business Support Division Head
Ide Kusuma Pribadi	Sharia Banking Division	Sharia Financing Business Deputy
Katon Djoko Soekarsono	Sharia Banking Division	Sharia IT & Operations Deputy
Asvianti Handaru W.	Sharia Banking Division	Sharia Funding & Treasury Deputy

Nama	Unit Kerja	Job Title
Cuk Hidayat	Sharia Banking Division	Sharia Support Deputy
Nur Khasanah	Treasury Division	Deputy Treasury Division Head
Agus Sumaryono	Wholesale Credit Risk Division	Deputy Wholesale Credit Risk Division Head
KANTOR WILAYAH		
Sri Soekminiarni	Regional Office 1	Deputy Regional Manager Business
Edward Melvin Purba		DRM Service & Collection
Hery Sarjito	Regional Office 2	Deputy Regional Manager Business
Wiyaksono		DRM Service & Collection
B. Bratawan Budi A	Regional Office 3	Deputy Regional Manager Business
Paulus Puspo Priyanto		DRM Service & Collection
Tiana Elma Hetty	Regional Office 4	Deputy Regional Manager Business
Imam Subiyantoro		DRM Service & Collection
Daulat Marpaung	Regional Office 5	Deputy Regional Manager Business
Fachri		DRM Service & Collection
Denny Kriswana	Regional Office 6	Deputy Regional Manager Business
Mawardi		DRM Service & Collection

Profil Pegawai —

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

(dalam satuan orang)

Jenis Kelamin	2023	2022
Pria	6.288	6.261
Wanita	5.757	5.598
Jumlah	12.045	11.859

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

Tabel Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

(dalam satuan orang)

Jabatan	2023			2022		
	Pria	Wanita	Total	Pria	Wanita	Total
Level 22	2	-	2	-	1	1
Level 19-21	134	24	158	116	19	135
Level 15-18	1.061	376	1.437	921	349	1.270
Level 13-14	1.762	1.149	2.911	1.724	1.080	2.804
Level 11-12	2.574	3.129	5.703	2.565	2.945	5.510
Level 8-10	755	1.079	1.834	935	1.204	2.139
Jumlah	6.288	5.757	12.045	6.261	5.598	11.859

Jumlah Pegawai Berdasarkan Rentang Usia

Tabel Jumlah Pegawai Berdasarkan Rentang Usia

(dalam satuan orang)

Rentang Usia	2023			2022		
	Pria	Wanita	Total	Pria	Wanita	Total
≥ 51	720	231	951	682	254	936
31–50	3.284	2.536	5.820	3.088	2.429	5.517
≤ 30	2.284	2.990	5.274	2.491	2.915	5.406
Jumlah	6.288	5.757	12.045	6.261	5.598	11.859

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

(dalam satuan orang)

Tingkat Pendidikan	2023			2022		
	Pria	Wanita	Total	Pria	Wanita	Total
Pasca Sarjana	367	168	535	348	159	507
Sarjana	5.254	4.627	9.881	5.154	4.353	9.507
Sarjana Muda	539	734	1.273	603	796	1.399
SLTA	128	228	356	156	290	446
Jumlah	6.288	5.757	12.045	6.261	5.598	11.859

Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Ketenagakerjaan

Tabel Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Ketenagakerjaan

(dalam satuan orang)

Status Ketenagakerjaan	2023			2022		
	Pria	Wanita	Total	Pria	Wanita	Total
Tetap	5.984	5.286	11.270	5.819	4.892	10.711
Kontrak	304	471	775	442	706	1.148
Jumlah Tanpa Pegawai <i>Outsource</i>	6.288	5.757	12.045	6.261	5.598	11.859
<i>Outsource</i>	6.930	1.157	8.087	7.093	1.094	8.187
Jumlah Termasuk Pegawai <i>Outsource</i>	13.218	6.914	20.132	13.354	6.692	20.046

Jumlah Pegawai Berdasarkan Masa Kerja

Tabel Jumlah Pegawai Berdasarkan Masa Kerja

(dalam satuan orang)

Masa Kerja	2023			2022		
	Pria	Wanita	Total	Pria	Wanita	Total
> 30th	50	58	108	64	63	127
Di atas 25th-30th	642	179	821	533	218	751
Di atas 20th-25th	129	21	150	332	43	375
Di atas 15th-20th	112	231	343	109	232	341
Di atas 10th-15th	1.046	1.345	2.391	749	1.008	1.757

Masa Kerja	2023			2022		
	Pria	Wanita	Total	Pria	Wanita	Total
Di atas 5th-10th	2.672	1.758	4.430	2.377	1.653	4.030
Di atas 0-5th	1.637	2.165	3.802	2.097	2.381	4.478
Jumlah	6.288	5.757	12.045	6.261	5.598	11.859

Komposisi Pemegang Saham

Komposisi Pemegang Saham disajikan sebagai berikut:

Tabel Komposisi Pemegang Saham Bank BTN Per 1 Januari 2023

Pemegang Saham	Jumlah Pemegang Saham	Jumlah Saham (Lembar)	Persentase Kepemilikan (%)
LOKAL			
Negara Republik Indonesia	1	8.420.666.648	65,34
Asuransi	72	211.372.947	1,64
Bank	3	12.308.689	0,10
Dana Pensiun	102	1.115.359.578	8,65
Koperasi	5	2.591.500	0,02
Lembaga Pemerintah	1	53	0,00
Perorangan Indonesia	48.482	1.320.244.137	10,24
Perseroan Terbatas	134	125.423.551	0,97
Reksadana	135	394.920.260	3,06
Yayasan	11	27.599.099	0,21
Sub Total	48.946	11.630.486.462	90,25
ASING			
Badan Usaha Asing	214	1.252.967.140	9,72
Perorangan Asing	65	3.691.940	0,03
Sub Total	279	1.256.659.080	9,75
TOTAL	49.225	12.887.145.542	100,00

Tabel Komposisi Pemegang Saham Bank BTN Per 31 Desember 2023

Pemegang Saham	Jumlah Pemegang Saham	Jumlah Saham (Lembar)	Persentase Kepemilikan (%)
LOKAL			
Negara Republik Indonesia	1	8.420.666.648	60,00
Asuransi	73	200.280.053	1,43
Bank	3	11.412.489	0,08
Dana Pensiun	104	1.366.263.155	9,74
Koperasi	5	2.764.700	0,02

Pemegang Saham	Jumlah Pemegang Saham	Jumlah Saham (Lembar)	Persentase Kepemilikan (%)
Perorangan Indonesia	55.885	1.921.912.997	13,69
Perseroan Terbatas	157	137.511.407	0,98
Reksadana	131	583.769.031	4,16
Yayasan	11	35.383.999	0,25
Sub Total	56.370	12.679.964.479	90,35
ASING			
Badan Usaha Asing	185	1.351.005.210	9,63
Perorangan Asing	74	3.474.724	0,02
Sub Total	259	1.354.479.934	9,65
TOTAL	56.629	14.034.444.413	100,00

Komposisi 20 Pemegang Saham Terbesar

Tabel Komposisi 20 Pemegang Saham Terbesar Bank BTN Per 1 Januari 2023

No.	Nama Investor	Status	Jumlah Saham (Lembar)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	DJS KETENAGAKERJAAN PROGRAM JHT	Lokal	389.275.808	3,02
2.	PT TASPEN (ASURANSI) - AFS	Lokal	273.280.900	2,12
3.	PT TASPEN	Lokal	251.148.600	1,95
4.	REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY FUND	Lokal	132.017.100	1,02
5.	JPMSE STOCK RE UCITS CLT RE-HANDELS BANK ENTILLVAXT MARK NAD TEMA	Asing	122.000.000	0,95
6.	CITIBANK NEW YORK S/A GEORGETOWN EMERGING MARKETS FUND SPC, LTD.-XING LONG FUND	Asing	92.000.000	0,71
7.	CITIBANK NEW YORK S/A GOVERNMENT OF NORWAY - 23	Asing	90.000.000	0,70
8.	DJS KETENAGAKERJAAN PROGRAM JP	Lokal	77.756.000	0,60
9.	REKSA DANA SAM DANA CERDAS	Lokal	62.286.958	0,48
10.	NT TST CO S/A LSV EMERGING MARKETS EQUITY FUND, LP	Asing	61.460.400	0,48
11.	BBH BOSTON S/A MATTHEWS EMERGING MARKETS SMALL COMPANIES FUND	Asing	57.454.700	0,45
12.	BNYM RE VANDERBILT UNIVERSITY-2039926099	Asing	51.523.100	0,40
13.	JPMCB NA RE - VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	Asing	50.224.738	0,39
14.	STATE STREET BANK-ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF	Asing	49.224.576	0,38
15.	JPMCB NA RE-VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	Asing	46.514.830	0,36
16.	BNYM RE BNYMLB RE EMPLOYEES PROVIDENT FD BOARD-2039927326	Asing	42.628.296	0,33
17.	CITIBANK NEW YORK S/A EMERGING MARKETS CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INV DIMENSIO	Asing	37.310.235	0,29
18.	MANULIFE DANA EKUITAS	Lokal	33.701.136	0,26
19.	CITIBANK NEW YORK S/A DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND	Asing	27.316.427	0,21
20.	JPMCB NA RE-AUSTRALIAN SUPER	Asing	26.622.300	0,21

Tabel Komposisi 20 Pemegang Saham Terbesar Bank BTN Per 31 Desember 2023

No.	Nama Investor	Status	Jumlah Saham (Lembar)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	DJS KETENAGAKERJAAN PROGRAM JHT	Lokal	389.275.808	2,77
2.	PT TASPEN (ASURANSI) - AFS	Lokal	362.166.723	2,58
3.	PT TASPEN	Lokal	332.835.794	2,37
4.	REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY FUND	Lokal	237.196.100	1,69
5.	JPMSE STOCK RE UCITS CLT RE-HANDELS BANK ENTILLVAXT MARKNAD TEMA	Asing	166.610.040	1,19
6.	REKSA DANA SAM DANA CERDAS	Lokal	86.500.058	0,62
7.	DJS KETENAGAKERJAAN PROGRAM JP	Lokal	77.756.000	0,55
8.	JPMCB NA RE - VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	Asing	66.560.556	0,47
9.	DP BTN II	Lokal	63.301.800	0,45
10.	JPMCB NA RE-VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	Asing	62.390.184	0,44
11.	NT TST CO S/A LSV EMERGING MARKETS EQUITY FUND, LP	Asing	61.460.400	0,44
12.	BNYM RE VANDERBILT UNIVERSITY	Asing	60.723.800	0,43
13.	STATE STREET BANK-ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF	Asing	53.781.176	0,38
14.	BNYM RE BNYMLB RE EMPLOYEES PROVIDENT FDBOARD-2039927326	Asing	52.862.458	0,38
15.	JPMCB NA RE - REB EMERGING MARKETS FINANCIALS FUND, LP	Asing	49.607.900	0,35
16.	CITIBANK NEW YORK S/A EMERGING MARKETS CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INV DIMENSIO	Asing	48.371.154	0,34
17.	STATE STREET BANK-CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	Asing	42.207.800	0,30
18.	STATE STREET BANK-LORD ABBETT SECURITIESTRUST LORD ABBETT INTERNATIONAL OPPORTU	Asing	41.619.000	0,30
19.	CITIBANK NEW YORK S/A GEORGETOWN EMERGING MARKETS FUND SPC, LTD.-XING LONG FUND	Asing	37.500.000	0,27
20.	CITIBANK NEW YORK S/A DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND	Asing	31.550.815	0,22

Komposisi Pemegang Saham 5% atau Lebih

Tabel Komposisi Pemegang Saham 5% atau Lebih Bank BTN per 1 Januari 2023

Nama Investor	Jumlah Saham	Persentase Kepemilikan (%)
Negara Republik Indonesia	8.420.666.648	65,34

Tabel Komposisi Pemegang Saham 5% atau Lebih Bank BTN per 31 Desember 2023

Nama Investor	Jumlah Saham	Persentase Kepemilikan (%)
Negara Republik Indonesia	8.420.666.648	60,00

Komposisi Pemegang Saham Masyarakat Kurang Dari 5%

Tabel Komposisi Kelompok Pemegang Saham Masyarakat Kurang dari 5% per 1 Januari 2023

Pemegang Saham	Jumlah Pemegang Saham	Jumlah Saham (Lembar)	Persentase Kepemilikan (%)
LOKAL			
Asuransi	72	211.372.947	1,64
Bank	3	12.308.689	0,10
Dana Pensiun	102	1.115.359.578	8,65

Pemegang Saham	Jumlah Pemegang Saham	Jumlah Saham (Lembar)	Persentase Kepemilikan (%)
Koperasi	5	2.591.500	0,02
Lembaga Pemerintah	1	53	0,00
Perorangan Indonesia	48.482	1.320.244.137	10,24
Perseroan Terbatas	134	125.423.551	0,97
Reksadana	135	394.920.260	3,06
Yayasan	11	27.599.099	0,21
Sub Total	48.945	3.209.819.814	24,91
ASING			
Badan Usaha Asing	214	1.252.967.140	9,72
Perorangan Asing	65	3.691.940	0,03
Sub Total	279	1.256.659.080	9,75
TOTAL	49.224	4.466.478.894	34,66

Tabel Komposisi Kelompok Pemegang Saham Masyarakat Kurang dari 5% per 31 Desember 2023

Pemegang Saham	Jumlah Pemegang Saham	Jumlah Saham (Lembar)	Persentase Kepemilikan (%)
LOKAL			
Asuransi	73	200.280.053	1,43
Bank	3	11.412.489	0,08
Dana Pensiun	104	1.366.263.155	9,74
Koperasi	5	2.764.700	0,02
Perorangan Indonesia	55.885	1.921.912.997	13,69
Perseroan Terbatas	157	137.511.407	0,98
Reksadana	131	583.769.031	4,16
Yayasan	11	35.383.999	0,25
Sub Total	56.369	4.259.297.831	30,35%
ASING			
Badan Usaha Asing	185	1.351.005.210	9,63%
Perorangan Asing	74	3.474.724	0,02%
Sub Total	259	1.354.479.934	9,65%
TOTAL	56.628	5.613.777.765	40,00%

Kepemilikan Saham oleh Direksi dan Dewan Komisaris

Tabel Kepemilikan Saham Direksi dan Dewan Komisaris Bank BTN per 1 Januari 2023

No.	Nama	Jabatan	Jumlah Saham	Persentase Kepemilikan (%)
DIREKSI				
1.	Haru Koesmahargo*	Direktur Utama	304.600	0,0023636
2.	Nixon L.P. Napitupulu	Wakil Direktur Utama	2.481.800	0,0192579
3.	Hirwandi Gafar	Direktur Consumer	603.900	0,0046861
4.	Nofry Rony Poetra	Direktur Finance	1.034.600	0,0080282
5.	Eko Waluyo	Direktur Human Capital, Compliance and Legal	770.900	0,0059819
6.	Elisabeth Novie Riswanti	Direktur Assets Management	589.300	0,0045728
7.	Andi Nirwoto	Direktur IT and Digital	859.161	0,0066668

No.	Nama	Jabatan	Jumlah Saham	Persentase Kepemilikan (%)
8.	Jasmin	Direktur Distribution and Funding	1.581.930	0,0122753
9.	Setiyo Wibowo	Direktur Risk Management	726.100	0,0056343
DEWAN KOMISARIS				
1.	Chandra M. Hamzah	Komisaris Utama/Independen	-	-
2.	Iqbal Latanro	Wakil Komisaris Utama/Independen	-	-
3.	Armand B. Arief	Komisaris Independen	-	-
4.	Ahdi Jumhari Luddin**	Komisaris Independen	-	-
5.	Sentot A. Sentausa	Komisaris Independen	-	-
6.	Andin Hadiyanto	Komisaris	-	-
7.	Herry Trisaputra Zuna	Komisaris	-	-
8.	Himawan Arief Sugoto	Komisaris	-	-
TOTAL			8.952.291	0,0694669

* Berhenti menjabat sejak 16 Maret 2023 berdasarkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun 2023.

** Berhenti menjabat sejak 12 Agustus 2023 karena meninggal dunia.

Tabel Kepemilikan Saham Direksi dan Dewan Komisaris Bank BTN per 31 Desember 2023

No.	Nama	Jabatan	Jumlah Saham	Persentase Kepemilikan (%)
DIREKSI				
1.	Nixon L.P. Napitupulu	Direktur Utama	4.250.500	0,0302862
2.	Oni Febriarto Rahardjo	Wakil Direktur Utama	308.000	0,0021946
3.	Hirwandi Gafar	Direktur Consumer	1.763.314	0,0125642
4.	Nofry Rony Poetra	Direktur Finance	2.531.022	0,0180344
5.	Eko Waluyo	Direktur Human Capital, Compliance and Legal	1.871.964	0,0133384
6.	Elisabeth Novie Riswanti	Direktur Assets Management	1.733.200	0,0123496
7.	Andi Nirwoto	Direktur IT and Digital	1.822.161	0,0129835
8.	Jasmin	Direktur Distribution and Funding	2.848.030	0,0202931
9.	Setiyo Wibowo	Direktur Risk Management	1.892.700	0,0134861
10.	Hakim Putratama	Direktur Institutional Banking	-	-
DEWAN KOMISARIS				
1.	Chandra M. Hamzah	Komisaris Utama/Independen	-	-
2.	Iqbal Latanro	Wakil Komisaris Utama/Independen	-	-
3.	Armand B. Arief	Komisaris Independen	-	-
4.	Sentot A. Sentausa	Komisaris Independen	-	-
5.	Andin Hadiyanto	Komisaris	-	-
6.	Herry Trisaputra Zuna	Komisaris	404.600	0,0028829
7.	Himawan Arief Sugoto	Komisaris	404.600	0,0028829
8.	Mohamad Yusuf Permana	Komisaris	-	-
TOTAL			19.830.091	0,1412959

Sampai dengan Desember 2023, tidak terdapat kepemilikan saham tidak langsung oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Kepemilikan Saham oleh Senior Manajemen

Sampai dengan Desember 2023, tidak terdapat kepemilikan saham langsung dan tidak langsung oleh Senior Manajemen Perseroan.

Klasifikasi Pemegang Saham

Tabel Klasifikasi Pemegang Saham Bank BTN Per 31 Desember 2023

Kepemilikan Saham	Jumlah Pemegang Saham	Jumlah Saham (Lembar)	Kepemilikan (%)
Institusi Lokal	484	2.337.384.834	41,64%
Institusi Asing	185	1.351.005.210	24,07%
Individu Lokal	55.885	1.921.912.997	34,24%
Individu Asing	74	3.474.724	0,06%
Total	56.628	5.613.777.765	100,00%

Pemegang Saham Utama dan Pengendali

Kepemilikan saham mayoritas Perseroan dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan kepemilikan saham sebesar 60,00%. Dengan demikian, Pemegang Saham Utama dan Pengendali Perseroan adalah Pemerintah Republik Indonesia sehingga tidak terdapat Pemegang Saham Utama dan Pengendali secara tidak langsung.



Daftar Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Perusahaan Ventura Bersama

Per 31 Desember 2023 maupun tanggal disampaikannya data/informasi ini, Perseroan tidak memiliki Entitas Anak dan/atau Entitas Asosiasi. Dengan demikian, tidak terdapat informasi terkait nama entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama beserta persentase kepemilikan saham, bidang usaha, total aset, dan status operasi entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama.

Informasi Kelompok Usaha Bank

Per 31 Desember 2023, Perseroan belum merupakan Kelompok Usaha Bank, sehingga tidak terdapat informasi struktur Kelompok Usaha Bank, struktur keterkaitan kepengurusan dalam Kelompok Usaha Bank dan pemegang saham yang bertindak atas nama pemegang saham lain.



Struktur Grup Perusahaan



Per 31 Desember 2023, Perseroan tidak memiliki Entitas Anak, Entitas Asosiasi, *Joint Venture* dan *Special Purpose Vehicle* (SPV).

Kronologi Penerbitan Saham

Pencatatan Saham Perdana (*Initial Public Offering/IPO*)

Perseroan mencatatkan sahamnya pertama kali di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 17 Desember 2009 dengan menawarkan 2.360.057.000 lembar saham Seri B atau 27,08% dari modal ditempatkan, dengan harga penawaran Rp800 per lembar saham kepada masyarakat. Pencapaian IPO (*Initial Public Offering*) tersebut mendapatkan sambutan yang sangat baik dari masyarakat, yang ditandai dengan *oversubscribe* sebanyak 2,04 kali dengan nilai *proceed* sebesar Rp1,88 triliun. Hal tersebut mendapatkan penghargaan “*Best IPO in Indonesia 2009*” dari majalah *The Asset* dan “*Mid Cap/IPO Deal of The Year in Southeast Asia 2009*” dari Publisher Alpha South Asia (Hong Kong).

Aksi Korporasi	:	Penawaran Umum Saham Perdana (<i>Initial Public Offering/IPO</i>)
Tahun Penerbitan Saham	:	17 Desember 2009
Jumlah Saham yang Ditawarkan	:	2.360.057.000 lembar saham Seri B atau 27,08% dari modal ditempatkan
Nilai Nominal Saham	:	Rp500 per lembar saham
Harga Penawaran	:	Rp800 per lembar saham
Jumlah Saham Sebelum IPO	:	0 lembar saham
Jumlah Saham Tercatat Setelah IPO	:	8.623.285.575 lembar saham Seri B
Pencatatan Bursa	:	Bursa Efek Indonesia

Penawaran Umum Terbatas I – *Rights Issue*

Pada tanggal 23 November 2012, Perseroan melakukan aksi korporasi berupa Penawaran Umum Terbatas I (PUT I) kepada para pemegang saham Perseroan dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atau *Rights Issue* dengan tujuan untuk memperkuat struktur permodalan dan juga untuk meningkatkan jumlah saham publik yang diperjual belikan (*floating shares*). Kondisi ini akan meningkatkan kapitalisasi pasar dan likuiditas saham BBTN di pasar modal sekaligus untuk mendukung pertumbuhan kredit, sehingga dapat menambah minat investor untuk berinvestasi lebih pada saham BBTN.

Aksi Korporasi	: Penawaran Umum Terbatas I - Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD)/Rights Issue
Jumlah Saham yang Ditawarkan	: 1.512.857.500 Saham Seri B
Nilai Nominal Saham	: Rp500
Harga Pelaksanaan	: Rp1.235
Jumlah Saham Tercatat Sebelum Rights Issue	: 8.859.291.500
Jumlah Saham Tercatat Setelah Rights Issue	: 10.481.074.500 lembar saham
Jumlah Dana (Proceeds) Diterima	: Rp1.868.379.012.500
Rasio Konversi	: 555.000 Saham Lama berhak atas 94.943 HMETD
Dilusi Kepemilikan	: 14,61% sebelum pelaksanaan MESOP dan sebesar 16,49% setelah pelaksanaan MESOP
Periode Perdagangan HMETD	: 23 - 29 November 2012
Periode Pelaksanaan HMETD	: 23 - 29 November 2012
Tanggal Pencatatan Efek di Bursa	: 23 November 2012
Pencatatan Bursa	: Bursa Efek Indonesia
Pembeli Siaga	: PT Bahana Securities, PT Danareksa Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas

Penawaran Umum Terbatas II – Rights Issue

Pada tanggal 28 Desember 2022, Perseroan melakukan aksi korporasi berupa Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II (PMHMETD II) kepada para pemegang saham Perseroan dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atau Rights Issue dengan tujuan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan dalam meningkatkan penyaluran jumlah kredit dan/atau pinjaman.

Aksi Korporasi	: Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II ("PMHMETD II")
Jumlah Saham yang Ditawarkan	: Sebanyak-banyaknya 3.444.444.413 (tiga miliar empat ratus empat puluh empat juta empat ratus empat puluh empat ribu empat ratus tiga belas) saham baru Seri B
Nilai Nominal Saham	: Rp500,- (lima ratus Rupiah)
Harga Pelaksanaan	: Rp1.200,- (seribu dua ratus Rupiah)
Jumlah Saham Tercatat Sebelum Rights Issue	: 10.590.000.000 (sepuluh miliar lima ratus sembilan puluh juta) saham
Jumlah Saham Tercatat Setelah Rights Issue	: 14.034.444.413 (empat belas miliar tiga puluh empat juta empat ratus empat puluh empat ribu empat ratus tiga belas) saham
Nilai Rights Issue	: Nilai PMN sebesar Rp2.479.999.997.600,- (dua triliun empat ratus tujuh puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) Nilai partisipasi publik sebesar Rp1.653.333.295.600,- (satu triliun enam ratus lima puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus rupiah)
Jumlah Dana (Proceeds) Diterima	: Rp4.133.333.295.600,- (empat triliun seratus tiga puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus rupiah)
Rasio Konversi	: Setiap pemegang 100.000.000 (seratus juta) Saham Lama berhak mendapatkan 32.525.443 (tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh lima ribu empat ratus empat puluh tiga) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru.
Dilusi Kepemilikan	: Pemegang saham yang tidak menggunakan haknya akan mengalami penurunan persentase kepemilikan maksimum sebesar 24,54% (dua puluh empat koma lima empat persen)
Periode Perdagangan HMETD	: 28 Desember 2022 - 5 Januari 2023
Periode Pelaksanaan HMETD	: 28 Desember 2022 - 5 Januari 2023
Tanggal Pencatatan Efek di Bursa	: 28 Desember 2022
Pencatatan Bursa	: Bursa Efek Indonesia
Pembeli Siaga	: PT CIMB Niaga Sekuritas

Kronologis Penerbitan/Pencatatan Saham Bank BTN

No.	Periode	Keterangan	Saham	Nilai Nominal (Rp)	Harga Penawaran (Rp)	
1.	Sebelum IPO	-	-	-		
2.	17 Desember 2009	Penawaran Umum Perdana	Saham Biasa Seri B	500	800	
3.	4 Februari 2011	Realisasi Program MESOP	Saham Biasa Seri B	500	855	
4.	4 Oktober 2011	Realisasi Program MESOP	Saham Biasa Seri B	500	855	
5.	1 Februari 2012	Realisasi Program MESOP	Saham Biasa Seri B	500	1.297	
6.	1 Mei 2012	Realisasi Program MESOP	Saham Biasa Seri B	500	-	
7.	23 November 2012	Penawaran Umum Terbatas I/ <i>Rights Issue</i>	Saham Biasa Seri B	500	1.235	
8.	1 Februari 2013	Realisasi Program MESOP	Saham Biasa Seri B	500	1.098	
9.	1 Juli 2013	Realisasi Program MESOP	Saham Biasa Seri B	500	-	
10.	1 Februari 2014	Realisasi Program MESOP	Saham Biasa Seri B	500	-	
11.	1 Juli 2014	Realisasi Program MESOP	Saham Biasa Seri B	500	-	
12.	2 Februari 2015	Realisasi Program MESOP	Saham Biasa Seri B	500	-	
13.	1 Juli 2015	Realisasi Program MESOP	Saham Biasa Seri B	500	-	
14.	1 Februari 2016	Realisasi Program MESOP	Saham Biasa Seri B	500	1.098	
15.	28 Desember 2022	Penawaran Umum Terbatas II/ <i>Rights Issue</i>	Saham Biasa Seri B	500	1.200	

Kronologi Penerbitan dan/atau Pencatatan Obligasi Serta Efek Lainnya —

Kronologi pencatatan efek lainnya yang dilakukan Perseroan terdiri dari pencatatan Obligasi, Sukuk, Sekuritisasi KPR, dan *Negotiable Certificate of Deposit* (NCD), dengan kronologis sebagai berikut.

Kronologi Penerbitan Obligasi

Tabel Kronologi Penerbitan Obligasi Bank BTN

Uraian	Tanggal distribusi Obligasi secara Elektronik	Tenor (Tahun)	Mata Uang	Jumlah Obligasi (Jutaan Rp)	Harga Penawaran	
Obligasi Bank BTN I Tahun 1989	25 Juli 1989	5	Rp	50.000	100% dari jumlah pokok Obligasi	
Obligasi Bank BTN II Tahun 1990	-	5	Rp	50.000	100% dari jumlah pokok Obligasi	
Obligasi Bank BTN III Tahun 1991	-	5	Rp	50.000	100% dari jumlah pokok Obligasi	
Obligasi Bank BTN IV Tahun 1991	-	5	Rp	100.000	100% dari jumlah pokok Obligasi	
Obligasi Bank BTN V Tahun 1993	-	5	Rp	150.000	100% dari jumlah pokok Obligasi	
Obligasi Bank BTN VI Tahun 1995	-	5	Rp	350.000	100% dari jumlah pokok Obligasi	

	Jumlah Saham yang Diterbitkan (lembar)	Modal Ditempatkan dan Disetor		
		Jumlah Saham (lembar)	Total Nilai Nominal (Rp)	Total Harga Penawaran (Rp)
	-	6.354.000.000	3.177.000.000.000	-
	2.360.057.000	8.714.057.000	4.357.028.500.000	1.888.045.600.000
	95.015.000	8.809.072.000	4.404.536.000.000	81.237.825.000
	26.898.500	8.835.970.500	4.417.985.250.000	22.998.217.500
	2.544.500	8.838.515.000	4.419.257.500.000	3.300.216.500
	5.068.000	8.843.583.000	4.421.791.500.000	-
	1.512.857.500	10.356.440.500	5.178.220.250.000	1.868.379.012.500
	206.420.500	10.562.861.000	5.281.430.500.000	226.649.709.000
	1.992.500	10.564.853.500	5.282.426.750.000	-
	407.000	10.565.260.500	5.282.630.250.000	-
	2.435.500	10.567.696.000	5.283.848.000.000	-
	24.500	10.567.720.500	5.283.860.250.000	-
	14.624.500	10.582.345.000	5.291.172.500.000	-
	7.655.000	10.590.000.000	5.295.000.000.000	8.405.190.000
	3.444.444.413	14.034.444.413	7.017.222.206.500	4.133.333.259.600

	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Suku Bunga	Status Pembayaran	Peringkat		Wali Amanat
				2023	2022	
	25 Juli 1994	18,75% tetap	Lunas	-	-	-
	1 Juni 1995	16,25% tetap	Lunas	-	-	-
	11 November 1996	20,00% tetap	Lunas	-	-	-
	23 Januari 1996	17,00% tetap	Lunas	-	-	-
	31 Juli 1998	15,25% tetap untuk tahun pertama dan kedua, mengambang untuk tahun berikutnya hingga jatuh tempo	Lunas	-	-	-
	21 Desember 2000	17,25% tetap untuk tahun pertama, mengambang untuk tahun berikutnya hingga jatuh tempo	Lunas	-	-	-

Uraian	Tanggal distribusi Obligasi secara Elektronik	Tenor (Tahun)	Mata Uang	Jumlah Obligasi (Jutaan Rp)	Harga Penawaran	
Obligasi Bank BTN VII Tahun 1996	-	5	Rp	200.000	100% dari jumlah pokok Obligasi	
Obligasi Bank BTN VIII Tahun 1997	-	5	Rp	400.000	100% dari jumlah pokok Obligasi	
Obligasi Bank BTN IX Tahun 2003	-	5	Rp	750.000	100% dari jumlah pokok Obligasi	
Obligasi Bank BTN X Tahun 2004	-	5	Rp	750.000	100% dari jumlah pokok Obligasi	
Obligasi Subordinasi BTN I Tahun 2004	-	10	Rp	250.000	100% dari jumlah pokok Obligasi	
Obligasi BTN XI Tahun 2005	-	5	Rp	750.000	100% dari jumlah pokok Obligasi	
Obligasi Bank BTN XII Tahun 2006	-	10	Rp	1.000.000	100% dari jumlah pokok Obligasi	
Obligasi Bank BTN XIII Tahun 2009 Seri A	-	3	Rp	300.000	100% dari jumlah pokok Obligasi	
Obligasi Bank BTN XIII Tahun 2009 Seri B	-	4	Rp	300.000	100% dari jumlah pokok Obligasi	
Obligasi Bank BTN XIII Tahun 2009 Seri C	-	5	Rp	900.000	100% dari jumlah pokok Obligasi	
Obligasi Bank BTN XIV Tahun 2010	11 Juni 2010	10	Rp	1.650.000	100% dari jumlah pokok Obligasi	
Obligasi Bank BTN XV Tahun 2011	28 Juni 2011	10	Rp	1.300.000	100% dari jumlah pokok Obligasi	
Obligasi Berkelanjutan I Bank BTN Tahap I Tahun 2012	5 Juni 2012	10	Rp	2.000.000	100% dari jumlah pokok Obligasi	
Obligasi Berkelanjutan I Bank BTN Tahap II Tahun 2013	27 Maret 2013	10	Rp	2.000.000	100% dari jumlah pokok Obligasi	
Obligasi Berkelanjutan II Bank BTN Tahap I Tahun 2015 Seri A	8 Juli 2015	3	Rp	900.000	100% dari jumlah pokok Obligasi	
Obligasi Berkelanjutan II Bank BTN Tahap I Tahun 2015 Seri B	8 Juli 2015	5	Rp	500.000	100% dari jumlah pokok Obligasi	
Obligasi Berkelanjutan II Bank BTN Tahap I Tahun 2015 Seri C	8 Juli 2015	7	Rp	800.000	100% dari jumlah pokok Obligasi	
Obligasi Berkelanjutan II Bank BTN Tahap I Tahun 2015 Seri D	8 Juli 2015	10	Rp	800.000	100% dari jumlah pokok Obligasi	
Obligasi Berkelanjutan II Bank BTN Tahap II Tahun 2016 Seri A	30 Agustus 2016	3	Rp	1.347.000	100% dari jumlah pokok Obligasi	
Obligasi Berkelanjutan II Bank BTN Tahap II Tahun 2016 Seri B	30 Agustus 2016	5	Rp	1.653.000	100% dari jumlah pokok Obligasi	
Obligasi Berkelanjutan III Bank BTN Tahap I Tahun 2017 Seri A	13 Juli 2017	3	Rp	1.466.000	100% dari jumlah pokok Obligasi	
Obligasi Berkelanjutan III Bank BTN Tahap I Tahun 2017 Seri B	13 Juli 2017	5	Rp	1.295.000	100% dari jumlah pokok Obligasi	
Obligasi Berkelanjutan III Bank BTN Tahap I Tahun 2017 Seri C	13 Juli 2017	7	Rp	853.000	100% dari jumlah pokok Obligasi	
Obligasi Berkelanjutan III Bank BTN Tahap I Tahun 2017 Seri D	13 Juli 2017	10	Rp	1.386.000	100% dari jumlah pokok Obligasi	
Obligasi Berkelanjutan III Bank BTN Tahap II Tahun 2019 Seri A	28 Juni 2019	370 Hari	Rp	1.756.500	100% dari jumlah pokok Obligasi	
Obligasi Berkelanjutan III Bank BTN Tahap II Tahun 2019 Seri B	28 Juni 2019	3	Rp	1.168.000	100% dari jumlah pokok Obligasi	
Obligasi Berkelanjutan III Bank BTN Tahap II Tahun 2019 Seri C	28 Juni 2019	5	Rp	1.219.500	100% dari jumlah pokok Obligasi	
Junior Global Bond Bank BTN	23 Januari 2020	5	USD	300	100% dari jumlah pokok Obligasi	
Obligasi Berkelanjutan IV Bank BTN Tahap I Tahun 2020 Seri A	19 Agustus 2020	370 Hari	Rp	577.000	100% dari jumlah pokok Obligasi	

	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Suku Bunga	Status Pembayaran	Peringkat		Wali Amanat
				2023	2022	
	22 Juli 2001	17,125% tetap untuk tahun pertama, mengambang untuk tahun berikutnya hingga jatuh tempo	Lunas	-	-	-
	18 Juli 2002	14,15% tetap	Lunas	-	-	-
	2 Oktober 2008	12,50% tetap	Lunas	-	-	-
	25 Mei 2009	12,20% tetap	Lunas	-	-	-
	25 Mei 2014*	12,60% tetap untuk tahun pertama sampai tahun kelima, 22,60% tetap untuk tahun keenam sampai tahun kesepuluh jika Bank tidak melakukan opsi beli pada tahun kelima sejak tanggal penerbitan	Lunas	-	-	-
	6 Juli 2010	12,00% tetap	Lunas	-	-	Bank Mega
	19 September 2016	12,75% tetap	Lunas	-	-	Bank Mega
	29 Mei 2012	11,75% tetap	Lunas	-	-	Bank Mega
	29 Mei 2013	12,00% tetap	Lunas	-	-	Bank Mega
	29 Mei 2014	12,25% tetap	Lunas	-	-	Bank Mega
	11 Juni 2020	10,25% tetap	Lunas	-	-	Bank Mega
	28 Juni 2021	9,50% tetap	Lunas	-	-	Bank Mega
	5 Juni 2022	7,90% tetap	Lunas	-	-	Bank Mega
	27 Maret 2023	7,90% tetap	Lunas	AA+(idn)	AA(idn)	Bank Mega
	8 Juli 2018	9,625% tetap	Lunas	-	-	Bank Mega
	8 Juli 2020	9,875% tetap	Lunas	-	-	Bank Mega
	8 Juli 2022	10,00% tetap	Lunas	-	-	Bank Mega
	8 Juli 2025	10,50% tetap	Belum Jatuh Tempo	AA+(idn)	AA(idn)	Bank Mega
	30 Agustus 2019	8,20% tetap	Lunas	-	-	Bank Mega
	30 Agustus 2021	8,75% tetap	Lunas	-	-	Bank Mega
	13 Juli 2020	8,30% tetap	Lunas	-	-	Bank BJB
	13 Juli 2022	8,50% tetap	Lunas	-	-	Bank BJB
	13 Juli 2024	8,70% tetap	Belum Jatuh Tempo	AA+(idn)	AA(idn)	Bank BJB
	13 Juli 2027	8,90% tetap	Belum Jatuh Tempo	AA+(idn)	AA(idn)	Bank BJB
	8 Juli 2020	7,750% tetap	Lunas	-	-	Bank Mega
	28 Juni 2022	8,750% tetap	Lunas	-	-	Bank Mega
	28 Juni 2024	9,000% tetap	Belum Jatuh Tempo	AA+(idn)	AA(idn)	Bank Mega
	23 Januari 2025	4,20%	Belum Jatuh Tempo	Ba3	Ba3 Moody's	Citicorp International Limited
	29 Agustus 2021	6,75%	Lunas	-	-	Bank BJB

Uraian	Tanggal distribusi Obligasi secara Elektronik	Tenor (Tahun)	Mata Uang	Jumlah Obligasi (Jutaan Rp)	Harga Penawaran	
Obligasi Berkelanjutan IV Bank BTN Tahap I Tahun 2020 Seri B	19 Agustus 2020	3	Rp	727.000	100% dari jumlah pokok Obligasi	
Obligasi Berkelanjutan IV Bank BTN Tahap I Tahun 2020 Seri C	19 Agustus 2020	5	Rp	196.000	100% dari jumlah pokok Obligasi	
Obligasi Berkelanjutan IV Bank BTN Tahap II Tahun 2022 seri A	24 Mei 2022	3	Rp	600.000	100% dari jumlah pokok Obligasi	
Obligasi Berkelanjutan IV Bank BTN Tahap II Tahun 2022 seri B	24 Mei 2022	5	Rp	400.000	100% dari jumlah pokok Obligasi	

Catatan:

- Rating Efek-efek dalam negeri yang masih *outstanding* di Tahun 2021 menggunakan *rating* dari Pefindo.
- Rating Efek-efek dalam negeri yang diterbitkan dan masih *outstanding* di Tahun 2022 menggunakan *rating* dari Fitch.
- Rating Junior Global Bond Bank BTN (USD) yang diterbitkan di Tahun 2020 menggunakan *rating* dari Moody's.
- Rating Efek-efek dalam negeri yang masih *outstanding* di Tahun 2023 menggunakan *rating* dari Pefindo

* Bank telah melakukan opsi beli kembali pada 25 Mei 2009.

Nama Bursa Tempat Obligasi Perusahaan Dicatatkan

Seluruh Obligasi Perseroan dalam IDR dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia dan Obligasi dalam USD dicatatkan pada Singapore Exchange.

Kronologi Penerbitan Sukuk

Tabel Kronologi Penerbitan Sukuk Bank BTN

Uraian	Tanggal Distribusi Sukuk secara Elektronik	Tenor (Bulan)	Mata Uang	Jumlah Sukuk (Jutaan Rp)	
Sukuk BTN I Tahun 2023 Tahap I	28 Juli 2023	159	Rp	92.553	
Sukuk BTN I Tahun 2023 Tahap II	27 Desember 2023	156	Rp	175.039	

Kronologis Pencatatan Sekuritisasi KPR

Perseroan telah melakukan sekuritisasi atas tagihan KPR melalui skema Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK-EBA) dan skema Efek Beragun Aset Berbentuk Surat Partisipasi (EBA-SP), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Kronologi Pencatatan Sekuritisasi KPR Bank BTN

No.	Transaksi Sekuritisasi	Nominal Total (Rp)	Kelas	Nominal (Rp)	Tanggal Transaksi	
1.	KIK-EBA DSMF 01	111.111.108.501	A	100.000.000.000	11 Februari 2009*	
2.			B	11.111.108.501		
3.	KIK-EBA DSMF 02	391.305.329.159	A	360.000.000.000	10 November 2009*	
4.			B	31.305.329.159		
5.	KIK-EBA DBTN 01	750.000.230.717	A	688.500.000.000	27 Desember 2010*	
6.			B	61.500.230.717		
7.	KIK-EBA DBTN 02	703.450.414.156	A	645.000.000.000	16 November 2011*	
8.			B	58.450.414.156		
9.	KIK-EBA DBTN 03	1.000.000.005.997	A	925.000.000.000	12 Desember 2012*	
10.			B	75.000.005.997		

	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Suku Bunga	Status Pembayaran	Peringkat		Wali Amanat
				2023	2022	
	19 Agustus 2023	7,80%	Lunas	AA+(idn)	_{id} AA+	Bank BJB
	19 Agustus 2025	8,40%	Belum Jatuh Tempo	AA+(idn)	_{id} AA+	Bank BJB
	24 Mei 2025	5,50%	Belum Jatuh Tempo	AA+(idn)	AA(idn)	Bank BJB
	24 Mei 2027	6,0%	Belum Jatuh Tempo	AA+(idn)	AA(idn)	Bank BJB

	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Nisbah	Status Pembayaran	Keterangan
	28 Oktober 2036	11,00% dari Pendapatan yang dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 0,55% per tahun.	Belum Jatuh Tempo	Surat Berharga ini tidak di-rating dan tidak dilakukan penawaran umum.
	27 Desember 2036	27,40% dari Pendapatan yang dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 1,37% per tahun.	Belum Jatuh Tempo	Surat Berharga ini tidak di-rating dan tidak dilakukan penawaran umum.

	Jatuh Tempo	Average Life	Kupon Kelas A	Peringkat Kelas A
	10 Januari 2018	5,30	13,000%	_{id} AAA
	10 Desember 2019	5,63	11,000%	_{id} AAA
	27 September 2019	5,35	9,250%	_{id} AAA
	27 Februari 2021	5,94	8,750%	_{id} AAA
	07 Januari 2023	6,35	7,750%	_{id} AAA

No.	Transaksi Sekuritisasi	Nominal Total (Rp)	Kelas	Nominal (Rp)	Tanggal Transaksi	
11.	KIK-EBA DBTN 04	1.000.000.005.941	A1	403.000.000.000	20 Desember 2013*	
12.			A2	525.000.000.000		
13.			B	72.000.005.941		
14.	KIK-EBA DBTN 05	1.500.000.001.615	A1	723.500.000.000	28 November 2014*	
15.			A2	647.500.000.000		
16.			B	129.000.001.615		
17.	EBA-SP SMF-BTN 01	200.000.000.041	A	181.600.000.000	27 November 2015	
18.			B	18.400.000.041		
19.	EBA-SP SMF-BTN 02	1.000.000.000.000	A1	400.000.000.000	31 Oktober 2016	
20.			A2	513.000.000.000		
21.			B	87.000.000.000		
22.	EBA-SP SMF-BTN 03	1.000.000.000.000	A1	200.000.000.000	28 April 2017	
23.			A2	713.000.000.000		
24.			B	87.000.000.000		
25.	EBA-SP SMF-BTN 04	2.000.000.000.000	A1	700.000.000.000	28 Februari 2018	
26.			A2	1.124.000.000.000		
27.			B	176.000.000.000		
28.	EBA-SP SMF-BTN 05	2.000.000.000.000	A1	574.000.000.000	27 November 2019	
29.			A2	1.142.000.000.000		
30.			M	24.000.000.000		
31.			B	260.000.000.000		
32.	EBA-SP SMF-BTN 06	631.000.543.015	A	576.734.000.000	30 Desember 2020	
33.			B	54.266.543.015		
34.	EBA-SP SMF-BTN 07	500.000.001.416	A	452.500.000.000	23 Desember 2022	
35.			B	47.500.001.416		
36.	EBA-SP SMF-BTN 08	600.000.020.055	A	544.800.000.000	26 September 2023	
37.			B	55.200.020.055		

*Bank sebagai Penyedia Jasa dalam transaksi sekuritisasi telah melaksanakan opsi *clean-up call* sesuai ketentuan.

Kronologi Penerbitan *Negotiable Certificate of Deposit*

Tabel Kronologi Pencatatan *Negotiable Certificate of Deposit*

Jenis NCD	Nominal Penerbitan (Rp)	Tanggal Transaksi	Seri	
NCD Tahap I	625.000.000.000	5 Desember 2014	A	
			B	
			C	
NCD Tahap II	1.005.000.000.000	26 Februari 2015	A	
			B	
			C	
			D	
NCD Tahap III	500.000.000.000	17 Februari 2015	E	
NCD Tahap IV	1.110.000.000.000	30 April 2015	A	
			B	
			C	
NCD Tahap I 2016	740.000.000.000	9 Juni 2016	A	

	Jatuh Tempo	Average Life	Kupon Kelas A	Peringkat Kelas A
	26 Februari 2022	5,57	A1 = 8,90%	AAA _{id}
			A2 = 9,50%	
	07 September 2025	6,72	A1 = 10%	AAA _{id}
			A2 = 10,25%	
	07 Maret 2022	3,95	8,60%	AAA _{id}
	27 Juni 2027	7,05	A1 = 8,15%	AAA _{id}
			A2 = 8,75%	
	07 Januari 2028	7,78	A1 = 8,00%	AAA _{id}
			A2 = 8,40%	
	07 Mei 2029	7,03	A1 = 7,00%	AAA _{id}
			A2 = 7,50%	
	07 Mei 2032	9,09	A1 = 8,50%	AAA _{id}
			A2 = 8,75%	
			M = 10,40%	A _{id}
	07 Juli 2032	6,08	6,50%	AAA _{id}
	07 Januari 2034	5,66	7,70%	AAA _{id}
				AAA _{id}
	07 Agustus 2035	7,44	6,65%	AAA _{id}

	Jangka Waktu	Jatuh Tempo	Rate	Nominal Per Seri
	6 bulan	4 Juni 2015	9,00%	280.000.000.000
	12 bulan	27 November 2015	9,25%	45.000.000.000
	15 bulan	26 Februari 2016	9,50%	300.000.000.000
	6 bulan	26 Agustus 2015	9,00%	470.000.000.000
	12 bulan	18 Februari 2016	9,25%	85.000.000.000
	15 bulan	19 Mei 2016	9,50%	10.000.000.000
	18 bulan	18 Agustus 2016	9,70%	440.000.000.000
	5 bulan	15 Juli 2015	9,00%	500.000.000.000
	6 bulan	30 Oktober 2015	8,75%	330.000.000.000
	12 bulan	2 Mei 2016	9,00%	620.000.000.000
	18 bulan	31 Oktober 2016	9,25%	160.000.000.000
	3 bulan	9 September 2016	6,85%	740.000.000.000

Jenis NCD	Nominal Penerbitan (Rp)	Tanggal Transaksi	Seri	
NCD Tahap II 2016	1.115.000.000.000	5 Agustus 2016	A	
			B	
			C	
NCD Tahap III 2016	371.000.000.000	30 November 2016	A	
			B	
NCD Tahap IV 2016	500.000.000.000	29 Desember 2016	A	
			B	
NCD Tahap V 2016	500.000.000.000	30 Desember 2016	-	
NCD Tahap I 2017	1.735.000.000.000	21 Februari 2017	A	
			B	
NCD Tahap III 2017	550.000.000.000	3 Oktober 2017	-	
NCD Tahap II 2017	1.050.000.000.000	5 Oktober 2017	A	
			B	
NCD Tahap IV 2017	540.000.000.000	13 Desember 2017	A	
			B	
NCD Tahap I 2018	1.440.000.000.000	3 April 2018	A	
NCD Tahap II 2018	690.000.000.000	18 Juli 2018	A	
			B	
NCD Tahap III 2018	2.020.000.000.000	5 November 2018	A	
			B	
			C	
NCD Tahap IV 2018	340.000.000.000	10 Desember 2018	A	
			B	
NCD Tahap I Tahun 2023	1.500.000.000.000	20 Oktober 2023	A	
			B	
			C	
Jumlah	16.331.000.000.000			

Kronologi Penerbitan *Long Term Notes* (LTN)

Penerbitan *Long Term Notes* (LTN) BTN ditujukan kepada investor tunggal BP Tapera, sebagai *reimburse* sumber dana BP Tapera bagi penyaluran KPR Tapera. Dengan demikian LTN merupakan Efek bersifat utang yang diterbitkan tanpa melalui proses Penawaran Umum dan tidak diperingkat.

Tabel Kronologi Penerbitan *Long Term Notes* (LTN) Bank BTN

Uraian	Tanggal Distribusi LTN secara Elektronik	Tenor (Bulan)	Jumlah LTN (Rp Ribuan)	
LTN BTN Tahun 2021 Tahap I	17 Desember 2021	186	10.185.851	
LTN BTN II Tahun 2022 Seri A	12 Juli 2022	171	47.740.325	
LTN BTN II Tahun 2022 Seri B	12 Juli 2022	177	79.378.706	
LTN BTN III Tahap I Tahun 2022	14 Desember 2022	177	210.866.282	
LTN BTN III Tahap II Tahun 2022	28 Desember 2022	171	131.184.885	
LTN BTN IV Tahap I Tahun 2023	28 Juli 2023	165	35.898.139	
LTN BTN IV Tahap II Tahun 2023	15 September 2023	168	404.745.014	
LTN BTN IV Tahap III Tahun 2023 Seri A	27 Desember 2023	180	6.241.671	
LTN BTN IV Tahap III Tahun 2023 Seri B	27 Desember 2023	168	234.541.750	

Keterangan: Surat Berharga LTN BTN tidak di-*rating* dan diterbitkan melalui penawaran terbatas kepada BP Tapera.

	Jangka Waktu	Jatuh Tempo	Rate	Nominal Per Seri
	3 bulan	3 November 2016	7,19%	440.000.000.000
	6 bulan	1 Februari 2017	7,47%	275.000.000.000
	12 bulan	10 Agustus 2017	7,80%	400.000.000.000
	3 bulan	28 Februari 2017	7,04%	20.000.000.000
	6 bulan	29 Mei 2017	7,26%	351.000.000.000
	3 bulan	29 Maret 2017	7,75%	315.000.000.000
	6 bulan	3 Juli 2017	7,74%	185.000.000.000
	6 bulan	3 Juli 2017	7,73%	500.000.000.000
	6 bulan	22 Agustus 2017	7,28%	1.195.000.000.000
	12 bulan	16 Februari 2018	7,43%	540.000.000.000
	12 bulan	2 Oktober 2018	6,50%	550.000.000.000
	6 bulan	3 April 2018	6,00%	230.000.000.000
	12 bulan	5 Oktober 2018	6,25%	820.000.000.000
	6 bulan	12 Juni 2018	5,90%	160.000.000.000
	12 bulan	13 Desember 2018	6,20%	320.000.000.000
	6 bulan	2 Oktober 2018	5,90%	830.000.000.000
	6 bulan	15 Januari 2019	7,60%	520.000.000.000
	12 bulan	16 Juli 2019	7,70%	170.000.000.000
	6 bulan	7 Mei 2019	8,30%	1.340.000.000.000
	9 bulan	2 Agustus 2019	8,40%	170.000.000.000
	12 bulan	5 November 2019	8,50%	510.000.000.000
	3 bulan	12 Maret 2019	8,00%	80.000.000.000
	6 bulan	11 Juni 2019	8,40%	260.000.000.000
	6 bulan	17 April 2024	6,40%	500.000.000.000
	9 bulan	16 Juli 2024	6,45%	70.000.000.000
	12 bulan	21 Oktober 2024	6,53%	930.000.000.000
				16.331.000.000.000

	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Suku Bunga	Status Pembayaran	Keterangan
	17 Juni 2037	1,37% tetap	Belum Jatuh Tempo	Surat Berharga ini tidak di-rating dan tidak dilakukan penawaran umum
	12 Oktober 2036	1,37% tetap	Belum Jatuh Tempo	Surat Berharga ini tidak di-rating dan tidak dilakukan penawaran umum
	12 April 2037	0,55% tetap	Belum Jatuh Tempo	Surat Berharga ini tidak di-rating dan tidak dilakukan penawaran umum
	14 Juni 2037	0,55% tetap	Belum Jatuh Tempo	Surat Berharga ini tidak di-rating dan tidak dilakukan penawaran umum
	28 Maret 2037	0,55% tetap	Belum Jatuh Tempo	Surat Berharga ini tidak di-rating dan tidak dilakukan penawaran umum
	28 April 2037	0,55% tetap	Belum Jatuh Tempo	Surat Berharga ini tidak di-rating dan tidak dilakukan penawaran umum
	15 September 2037	1,37% tetap	Belum Jatuh Tempo	Surat Berharga ini tidak di-rating dan tidak dilakukan penawaran umum
	27 Desember 2038	0,55% tetap	Belum Jatuh Tempo	Surat Berharga ini tidak di-rating dan tidak dilakukan penawaran umum.
	27 Desember 2037	1,37% tetap	Belum Jatuh Tempo	Surat Berharga ini tidak di-rating dan tidak dilakukan penawaran umum.



Informasi Penggunaan Jasa Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik —

Nama KAP	KAP Purwantono, Sungkoro & Surja
Jaringan Asosiasi	Ernst & Young Global Limited
Alamat KAP	Indonesia Stock Exchange Building Tower 2, 5 th Floor Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53, Jakarta 12190, Indonesia
Situs Web	www.ey.com/en_gl/locations/indonesia
Nama AP	Christophorus Alvin Kossim
Periode Penugasan KAP	Periode ke-9
Periode Penugasan AP	Periode ke-1
Jasa Audit	General Audit Tahun Buku 2023
Jasa Non Audit	Tidak memiliki jasa non audit
Fee Audit	Rp4.800.000.000
Fee Non Audit	-

Lembaga dan/atau Profesi Penunjang —

BANK KUSTODIAN	
Nama	PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Alamat	Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 1, Lantai 5. Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, Indonesia
Telepon	(021) 5152855
Faksimili	(021) 52991199
Email	helpdesk@ksei.co.id
Situs Web	www.ksei.co.id
Bentuk Jasa	Kustodian dan Agen Pembayaran
Periode Penugasan	Sepanjang umur Efek Bersifat Utang

BIRO ADMINISTRASI EFEK	
Nama	PT Datindo Entrycom
Alamat	Jl. Hayam Wuruk No.28, Lantai 2 Jakarta 10120 - Indonesia
Telepon	(021) 3508077
Faksimili	(021) 3508077
Email	corporatesecretary@datindo.com
Situs Web	https://www.datindo.com
Bentuk Jasa	Biro Administrasi Efek untuk Saham
Periode Penugasan	9 Desember 2009 – sekarang

WALI AMANAT

Nama	PT Bank Mega Tbk
Alamat	Menara Bank Mega, Jl. Kapten P. Tendean No. 12-14A, Jakarta 12790, Indonesia
Telepon	(021) 79175000
Faksimili	(021) 79187100
Email	waliamanat@bankmega.com
Situs Web	www.bankmega.com
Bentuk Jasa	Wali Amanat Obligasi
Periode Penugasan	Sepanjang Umur Obligasi

Nama	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (Bank BJB)
Alamat	Sinarmas MSIG Tower Lantai 9, Jl. Jend. Sudirman kav. 21, Jakarta Selatan, Indonesia
Telepon	(021) 5228737 Ext. 101
Faksimili	(021) 5228738
Email	-
Situs Web	www.bankbjb.co.id
Bentuk Jasa	Wali Amanat Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan
Periode Penugasan	Sepanjang Umur Obligasi

Nama	Citicorp International Limited
Alamat	20 th Floor, Citi Tower, One Bay East 83 Hoi Bun Road, Kwun Tong Kowloon, Hong Kong
Telepon	-
Faksimili	(+852) 2323 0279
Email	-
Situs Web	-
Bentuk Jasa	Trustee Junior Global Bond 2020
Periode Penugasan	Sepanjang umur Junior Global Bond

PEMERINGKAT EFEK

Nama	PT Fitch Ratings Indonesia
Alamat	DBS Bank Tower 24th Floor Suite 2403, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5, Jakarta 12940 Indonesia
Telepon	(021) 29886800
Faksimili	(021) 29886822
Email	-
Situs Web	www.fitchratings.com
Bentuk Jasa	Pemeringkat
Periode Penugasan	Sepanjang umur Obligasi



Nama	Moody's Investor Service Singapore Pte. Ltd
Alamat	50 Raffles Place #23-06 Singapore Land Tower, Singapore 48623
Telepon	-
Faksimili	-
Email	-
Situs Web	www.moody's.com
Bentuk Jasa	Pemeringkat
Periode Penugasan	Sepanjang umur Junior Global Bond

Nama	PT. Pemeringkat Efek Indonesia
Alamat	Equity Tower Lt. 30, Sudirman Business District, Lot 9, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53, Jakarta Selatan 12190, Indonesia
Telepon	(021) 509 68469
Faksimili	(021) 509 68468
Email	-
Situs Web	www.pefindo.com
Bentuk Jasa	Pemeringkat
Periode Penugasan	1 Juni 2024

KONSULTAN HUKUM

Nama	HKGM & Partners
Alamat	Pondok Indah Plaza 3, Blok E/4 & E/5, Jl. TB Simatupang Jakarta 12310, Indonesia
Telepon	(021) 75900215
Faksimili	(021) 75900225
Email	hkgmlaw@indo.net.id
Situs Web	-
Bentuk Jasa	Konsultasi Hukum
Periode Penugasan	10 April 2023

KONSULTAN HUKUM ON CALL

Nama	UMBRA
Alamat	Telkom Landmark Tower, Tower 2, 49 th Floor, Jl. Gatot Subroto Kav 52, Jakarta 12710
Telepon	(021) 5082 0999
Faksimili	-
Email	raditya@umbra.law
Situs Web	www.umbra.law
Bentuk Jasa	Konsultasi Hukum terkait Transaksi Afiliasi dan/atau Transaksi Benturan Kepentingan serta Transaksi Material
Periode Penugasan	01 Mei 2023 - 31 Agustus 2023

Nama	Ali Budiarjo, Nugroho, Reksodiputro (ABNR)
Alamat	Graha CIMB Niaga, 24 th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav 58, Jakarta 12190
Telepon	(021) 250 5125 / 5136
Faksimili	(021) 250 5001 / 5121/ 5122 / 5392
Email	info@abnrlaw.com
Situs Web	www.abnrlaw.com
Bentuk Jasa	Konsultasi Hukum terkait Penyusunan Kajian Hukum Terhadap Pemberlakuan UU PPSK, Project Internalisasi Peraturan Menteri BUMN 2023
Periode Penugasan	26 Januari 2023 - 03 Februari 2023 , 23 Juni 2023 - 30 Agustus 2023

Nama	K&K Advocates
Alamat	KMO Building, 5 th Floor, Suite 502, Jl. Kyai Maja No. 1 Kebayoran Baru – Jakarta Selatan 12120
Telepon	(021) 2902 0331
Faksimili	(021) 2902 3107
Email	office@kk-advocates.com
Situs Web	kk-advocates.com
Bentuk Jasa	Konsultasi Hukum terhadap Mitigasi Risiko Hukum atas Implementasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai Jaminan Kredit pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dan konsultasi hukum pembentukan Pedoman Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual.
Periode Penugasan	11 Mei 2023 - 4 Agustus 2023

Nama	Ardianto & Masniari Counselors at Law
Alamat	Prosperity Tower Level 6 District 8 SCBD, Jln. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta, 12190, DKI Jakarta
Telepon	(021) 5082 0450, 5082 0451
Faksimili	-
Email	adrianus.ardianto@am-lw.com , masniari.sitompul@am-lw.co
Situs Web	am-lw.com
Bentuk Jasa	Konsultasi Hukum dalam rencana Investasi melalui Skema Dana Ventura dengan Perusahaan Modal Ventura
Periode Penugasan	09 Maret - 09 Juni 2023

Nama	Hielmy Izzudin dan Rekan
Alamat	Kav PTB DKI F2/28 Pondok Kelapa, Jakarta Timur
Telepon	0812 8883 7972
Faksimili	-
Email	Hielmyizzudin.law@gmail.com
Situs Web	-
Bentuk Jasa	Konsultasi Hukum terkait Pedoman Pelaksanaan Asesmen Risiko Hukum Bank BTN, Konsultasi Hukum pembentukan Standardisasi Legal Audit dan Manual Book Standardisasi Legal Audit dan Konsultasi hukum pembentukan Pedoman Pengelolaan Cadangan Risiko Hukum.
Periode Penugasan	28 Maret 2023 s.d 26 Mei 2023 , 28 April 2023 - 30 November 2023



NOTARIS

Nama	Siti Rayhana, SH
Alamat	Riviera Timur No. 1 Cluster La Bella, Riviera Village, Jl. Gading Golf Boulevard, Gading Serpong, Cihuni, Kec. Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten 15332
Telepon	(021) 55687610
Faksimili	-
Email	siti.rayhana@yahoo.co.id
Situs Web	N/A
Bentuk Jasa	• Melakukan Pengikatan Perjanjian Penerbitan LTN BTN IV Tahun 2023 • Notaris Due Dilligence Transaksi Sekuritisasi EBA-SP SMF-BTN08 • Menerbitkan Akta Perjanjian Kerja Sama dengan PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk.
Periode Penugasan	Sampai dengan masing – masing transaksi selesai.

Nama	Sari Bhirawati, SH
Alamat	Jl. Wijaya I No. 56, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12170
Telepon	(021) 7226108
Faksimili	-
Email	kantornotarissaribhirawati@gmail.com
Situs Web	-
Bentuk Jasa	Menerbitkan Akta Perjanjian Kerja Sama antara PT Asuransi Jasa Raharja Putera dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
Periode Penugasan	25 September 2023

Nama	Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H.
Alamat	Jl. Panglima Polim V No. 11, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Telepon	(021) 7392801
Faksimili	(021) 7265090
Email	poerbaningsih@yahoo.com
Situs Web	-
Bentuk Jasa	• Melakukan Pengikatan Perjanjian Transaksi Sekuritisasi EBA-SP SMF-BTN08. • Menerbitkan Akta Perjanjian Kerja Sama dengan PT Indonesia Infrastructure Finance. • Menerbitkan Akta Perjanjian Kerja Sama dengan PT Bank DKI. • Menerbitkan Addendum II Perjanjian Kerja Sama dengan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.
Periode Penugasan	Sampai dengan masing – masing transaksi selesai.

Nama	Ashoya Ratam, S.H., M.Kn.
Alamat	Jalan Surya Nomor 54, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Telepon	(021) 29236060
Faksimili	-
Email	notaris@ashoyaratam.com
Situs Web	-
Bentuk Jasa	Jasa sebagai Notaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan dan Pelaksanaan Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II (PMHMETD II).
Periode Penugasan	Sampai dengan selesainya pelaksanaan RUPS dan PMHMETD II.

Penghargaan dan Sertifikasi

PENGHARGAAN

Indonesia Excellence Good Corporate Governance Ethics in Providing End-to-End Mortgage Solutions

Acara:
Indonesia Excellence GCG Awards 2023

Penyelenggara:
Warta Ekonomi

Tanggal:
31 Januari 2023

Syariah Insight 2023 - Top Sharia Business Unit in KBMI 3 Category

Acara:
3rd Indonesia Syariah Awards 2023

Penyelenggara:
The Iconomics

Tanggal:
17 Februari 2023

Best Performance Chief Financial Officer 2023 in Increasing Net Profit Through Strategic Initiatives

Acara:
Indonesia Best CFO Awards 2023

Penyelenggara:
Warta Ekonomi

Tanggal:
28 Februari 2023

Gold Winner - Corporate PR - Kesuksesan Strategi Komunikasi Rights Issue BTN

Acara:
Public Relations Indonesia Awards 2023

Penyelenggara:
PR Indonesia

Tanggal:
17 Maret 2023

KPR BTN iB - The 2nd Highest Digital Index - Sharia Business Unit Mortgage Loan

Acara:
Digital Brand Award 2023

Penyelenggara:
Infobank

Tanggal:
12 April 2023

Indonesia's Home - Grown Consumer Brands Award 2023 in Home Loan Category

Acara:
Indonesia's Home Grown Consumer Brands Award 2023

Penyelenggara:
The Iconomics

Tanggal:
17 Februari 2023

Best Public Relation in Company Strategy on Providing Innovative Housing Loan Product and Services

Acara:
Indonesia Public Relation Awards 2023

Penyelenggara:
Warta Ekonomi

Tanggal:
24 Februari 2023

Best Companies

Acara:
Obsession Award 2023

Penyelenggara:
Obsession Media Group

Tanggal:
15 Maret 2023

Bronze Winner - Media Sosial - Instagram

Acara:
Public Relations Indonesia Awards 2023

Penyelenggara:
PR Indonesia

Tanggal:
17 Maret 2023

The Best Sharia Business Unit - Conventional Bank Kategori: Asset Class > Rp 10 T

Acara:
Digital Brand Award 2023

Penyelenggara:
Infobank

Tanggal:
12 April 2023





The Best Debit Card Sharia Business Unit Conventional Bank

Acara:
Digital Brand Award 2023
Penyelenggara:
Infobank
Tanggal:
12 April 2023

The Best Debit Card Conventional Bank (KBMI) 3

Acara:
Digital Brand Award 2023
Penyelenggara:
Infobank
Tanggal:
12 April 2023

The Best Conventional Bank (KBMI) 3 Kategori: Asset Class >Rp200 T

Acara:
Digital Brand Award 2023
Penyelenggara:
Infobank
Tanggal:
12 April 2023

The 3rd Best Internet Banking Conventional Bank (KBMI) 3 Kategori: Asset Class >Rp200 T

Acara:
Digital Brand Award 2023
Penyelenggara:
Infobank
Tanggal:
12 April 2023

The Best Mortgage Loan Conventional Bank (KBMI) 3 Kategori: Asset Class >Rp200 T

Acara:
Digital Brand Award 2023
Penyelenggara:
Infobank
Tanggal:
12 April 2023

The 3rd Best Mobile Banking Conventional Bank (KBMI) 3 Kategori: Asset Class >Rp200 T

Acara:
Digital Brand Award 2023
Penyelenggara:
Infobank
Tanggal:
12 April 2023

The Highest Digital Index Sharia Business Unit

Acara:
Digital Brand Award 2023
Penyelenggara:
Infobank
Tanggal:
12 April 2023

The Best Bank Saving Account (KBMI) 3 Kategori: Asset Class >Rp200 T

Acara:
Digital Brand Award 2023
Penyelenggara:
Infobank
Tanggal:
12 April 2023

The Best Deposito Conventional Bank (KBMI) 3 Kategori: Asset Class >Rp200 T

Acara:
Digital Brand Award 2023
Penyelenggara:
Infobank
Tanggal:
12 April 2023

The Best Wealth Management Conventional Bank (KBMI) 3 Kategori: Asset Class >Rp200

Acara:
Digital Brand Award 2023
Penyelenggara:
Infobank
Tanggal:
12 April 2023

The 2nd Highest Digital Index Bank Savings Account

Acara:
Digital Brand Award 2023
Penyelenggara:
Infobank
Tanggal:
12 April 2023

KPR BTN - Gold Champion

Acara:
Indonesia WOW Brand 2023
Penyelenggara:
Markplus Insight
Tanggal:
11 Mei 2023



BTN Syariah Bronze Champion

Acara:
Indonesia WOW Brand 2023

Penyelenggara:
Markplus Insight

Tanggal:
11 Mei 2023

Juara III Kategori Industri

Acara:
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

Penyelenggara:
TrackAML Hackathon 21 Tahun APUPPT Indonesia

Tanggal:
30 Mei 2023

Performa Terbaik Customer Service 11 Bank tahun 2022-2023

Acara:
Bank Service Excellence Monitor 2023

Penyelenggara:
Infobank dan Marketing Research Indonesia

Tanggal:
Mei 2023

Performa Terbaik Kenyamanan di Kantor Cabang 11 Bank tahun 2022-2023 (Nomor 10)

Acara:
Bank Service Excellence Monitor 2023

Penyelenggara:
Infobank dan Marketing Research Indonesia

Tanggal:
Mei 2023

Performa Terbaik Staf Prioritas 11 Bank tahun 2022-2023 (Nomor 6)

Acara:
Bank Service Excellence Monitor 2023

Penyelenggara:
Infobank dan Marketing Research Indonesia

Tanggal:
Mei 2023

Performa Terbaik Internet Banking 10 Bank tahun 2022-2023 (Nomor 10)

Acara:
Bank Service Excellence Monitor 2023

Penyelenggara:
Infobank dan Marketing Research Indonesia

Tanggal:
Mei 2023

Bank Terbaik 2023

Acara:
Investor Daily Award 2023

Penyelenggara:
Investor Daily

Tanggal:
26 Mei 2023

Social CSR Initiatives - Pelatihan Developer

Acara:
CSR Award 2023

Penyelenggara:
Investor Daily

Tanggal:
31 Mei 2023

Performa Teller Terbaik 11 Bank tahun 2022-2023 (Nomor 8)

Acara:
Bank Service Excellence Monitor 2023

Penyelenggara:
Infobank dan Marketing Research Indonesia

Tanggal:
Mei 2023

Performa Terbaik Kenyamanan di Kantor Cabang Prioritas 11 Bank tahun 2022-2023 (Nomor 6)

Acara:
Bank Service Excellence Monitor 2023

Penyelenggara:
Infobank dan Marketing Research Indonesia

Tanggal:
Mei 2023

Performa Terbaik Mobile Banking 10 Bank tahun 2022-2023 (Nomor 3)

Acara:
Bank Service Excellence Monitor 2023

Penyelenggara:
Infobank dan Marketing Research Indonesia

Tanggal:
Mei 2023

Performa Terbaik Pengelolaan Social Media 10 Bank tahun 2022-2023 (Nomor 10)

Acara:
Bank Service Excellence Monitor 2023

Penyelenggara:
Infobank dan Marketing Research Indonesia

Tanggal:
Mei 2023



Performa Terbaik ATM Tunai di Public Area 10 Bank tahun 2022-2023 (Nomor 6)

Acara:
Bank Service Excellence Monitor 2023

Penyelenggara:
Infobank dan Marketing Research Indonesia

Tanggal:
Mei 2023

Best Mid Cap - Gold

Acara:
FinanceAsia's 23rd Best Companies in Asia Award

Penyelenggara:
Finance Asia's

Tanggal:
14 Juni 2023

The 1st Best - Convenience Branch Experience in Priority Service - Conventional Bank

Acara:
20th Infobank - MRI Banking Service Excellent 2023

Penyelenggara:
Infobank dan Marketing Research Indonesia (MRI)

Tanggal:
20 Juni 2023

The Best Indonesia Sales Marketing Award -VI -2023 Kategori Bank BUKU 3 (Platinum Award Score 93-very excellent)

Acara:
ISMA Sales & Marketing Award 2023

Penyelenggara:
Economic Review

Tanggal:
23 Juni 2023

4th Indonesia Top Bank Award 2023

Acara:
Indonesia Top Bank Award 2023

Penyelenggara:
The Iconomic

Tanggal:
27 Juni 2023

Wealth Management Platform of The Year

Acara:
Retail Banking Awards 2023

Penyelenggara:
Asian Banking & Finance (media)

Tanggal:
25 Juli 2023

Top CSR Star 4

Acara:
Top CSR Award 2023

Penyelenggara:
Top Business

Tanggal:
9 Juni 2023

The World's Best Islamic Project Finance House 2023

Acara:
Brand Awards Winners 2023

Penyelenggara:
EuroMoney

Tanggal:
14 Juni 2023

Konstituen Indeks Tempo-IDN Financial Kategori Main Index

Acara:
Malam Apresiasi Emiten Launching Indeks Tempo-IDN Financials 52

Penyelenggara:
TEMPO dan IDN Financials

Tanggal:
23 Juni 2023

Elisabeth Novie Riswanti - Indonesia Most Powerful Women 2023

Acara:
Indonesia Most Powerful Women 2023

Penyelenggara:
SWA

Tanggal:
27 Juni 2023

Excellence in Executing People Transformation in Banking Industry

Acara:
The 8th Annual 2023 SPEX2 DX Award "Executing Digital Transformation"

Penyelenggara:
GML Consulting & Kontan

Tanggal:
10 Juli 2023

Excellent - Learning & Development and Knowledge Management

Acara:
HR Excellence Awards 2023

Penyelenggara:
SWA Network & Lembaga Manajemen FEB UI (LMFEBUI)

Tanggal:
20 Juli 2023



Very Good - Reward Management & Talent Retention Strategy

Acara:

HR Excellence Awards 2023

Penyelenggara:

SWA Network & Lembaga Manajemen FEB UI (LMFEBUI)

Tanggal:

20 Juli 2023

BTN Syariah - Peringkat 2 - Bank Dengan Penyaluran Pembiayaan Terbanyak Kuartal 2 (Q2) Tahun 2023

Acara:

Penghargaan BP Tapera

Penyelenggara:

BP Tapera

Tanggal:

26 Juli 2023

Peringkat 3 - Bank Dengan Capaian Komitmen diatas 100% Kuartal 2 (Q2) Tahun 2023

Acara:

Penghargaan BP Tapera

Penyelenggara:

BP Tapera

Tanggal:

26 Juli 2023

Bank BTN Syariah - Peringkat 6 - Bank Dengan Capaian Komitmen di Atas 100% Semester 2 (Q2) Tahun 2023

Acara:

Penghargaan BP Tapera

Penyelenggara:

BP Tapera

Tanggal:

26 Juli 2023

Pemimpin Berpengaruh di Media Digital

Acara:

IDEAS Indonesia DEI & ESG Awards

Penyelenggara:

Humas Indonesia

Tanggal:

4 Agustus 2023

Excellent Financial Performance Bank in 2022 (KBMI 3)

Acara:

28th Infobank Award

Penyelenggara:

Infobank

Tanggal:

25 Agustus 2023

Very Good - Employer Branding and Talent Acquisition

Acara:

HR Excellence Awards 2023

Penyelenggara:

SWA Network & Lembaga Manajemen FEB UI (LMFEBUI)

Tanggal:

20 Juli 2023

Bank BTN - Peringkat 1 - Bank Dengan Penyaluran Pembiayaan Terbanyak Kuartal 2 (Q2) Tahun 2023

Acara:

Penghargaan BP Tapera

Penyelenggara:

BP Tapera

Tanggal:

26 Juli 2023

Bank BTN Syariah - Bank Nasional dengan Tingkat Keterhunan Tertinggi Semester 2 (Q2) Tahun 2023

Acara:

Penghargaan BP Tapera

Penyelenggara:

BP Tapera

Tanggal:

26 Juli 2023

Best Saving Bank

Acara:

Best Savings Bank in Indonesia 2023

Penyelenggara:

Global Brands Magazine

Tanggal:

31 Juli 2023

Best Campaign - Banking & Finance

Acara:

MOB-EX Award 2023

Penyelenggara:

Marketing Interaktif

Tanggal:

14 Agustus 2023

The Greatest Champions of GRC Excellence Kategori: Banking Industries

Acara:

GRC & Performance Excellence Awards 2023

Penyelenggara:

Businessnews

Tanggal:

30 Agustus 2023





The Best GRS for IT/Digital Transformation 2023 Kategori: Banking Industries

Acara:
GRC & Performance Excellence Awards 2023

Penyelenggara:
Businessnews

Tanggal:
30 Agustus 2023

The Best Chief Compliance Officer 2023 Kategori: Banking Industries

Acara:
GRC & Performance Excellence Awards 2023

Penyelenggara:
Businessnews

Tanggal:
30 Agustus 2023

Top GRC Award 2023 Star 5

Acara:
Top GRC Awards 2023

Penyelenggara:
Top Business

Tanggal:
6 September 2023

The Most The High Performing Board of Commissioner on GRC 2023

Acara:
Top GRC Awards 2023

Penyelenggara:
Top Business

Tanggal:
6 September 2023

The Most Prominent Book 3 Bank in Property Credit

Acara:
Prominent Award

Penyelenggara:
Metro TV - Solutee.id

Tanggal:
18 September 2023

Best Bank for CSR in Indonesia

Acara:
AsiaMoney Awards

Penyelenggara:
AsiaMoney

Tanggal:
26 September 2023

The Best CEO for GRC Excellence 2023 Kategori: Banking Industries

Acara:
GRC & Performance Excellence Awards 2023

Penyelenggara:
Businessnews

Tanggal:
30 Agustus 2023

TrenAsia ESG Award 2023

Acara:
TrenAsia ESG Award 2023

Penyelenggara:
TrenAsia

Tanggal:
30 Agustus 2023

The Most Committed GRC Leader 2023

Acara:
Top GRC Awards 2023

Penyelenggara:
Top Business

Tanggal:
6 September 2023

TrenAsia ESG The Best Financial Sector dan Top 50 Biggest Market Capitalization Public Listed Companies

Acara:
The 14th IICD Awards 2023

Penyelenggara:
IICD

Tanggal:
18 September 2023

The Most Prominent State Owned Company Book 3 Bank in Financial Contribution to The Nation

Acara:
Prominent Award

Penyelenggara:
Metro TV - Solutee.id

Tanggal:
18 September 2023

The Best Quality Team - Gold

Acara:
The Best Contact Center Indonesia 2023

Penyelenggara:
Indonesia Contact Center Association (ICCA)

Tanggal:
26 September 2023



The Best Employee Engagement - Gold

Acara:
The Best Contact Center Indonesia 2023

Penyelenggara:
Indonesia Contact Center Association (ICCA)

Tanggal:
26 September 2023

The Best Technology Innovation - Gold

Acara:
The Best Contact Center Indonesia 2023

Penyelenggara:
Indonesia Contact Center Association (ICCA)

Tanggal:
26 September 2023

Indonesia Service Experience of the Year

Acara:
The Asian Experience Awards 2023

Penyelenggara:
The Asian Business Review

Tanggal:
5 Oktober 2023

TOP Human Capital Awards 2023 # Stars 4

Acara:
TOP Human Capital Awards 2023

Penyelenggara:
TOP Business

Tanggal:
19 Oktober 2023

Kategori Pendidikan

Acara:
Anugerah CSR 2023

Penyelenggara:
Republika.co.id

Tanggal:
26 Oktober 2023

Silver Winner for Excellence in Omnichannel

Acara:
Marketing Excellence Awards 2023

Penyelenggara:
Marketing Interactive

Tanggal:
31 Oktober 2023

The Best Business Contribution - Silver

Acara:
The Best Contact Center Indonesia 2023

Penyelenggara:
Indonesia Contact Center Association (ICCA)

Tanggal:
26 September 2023

106 Perusahaan dan Instansi Berpengaruh di Bidang Komunikasi

Acara:
Sewindu PR Indonesia

Penyelenggara:
PR Indonesia

Tanggal:
26 September 2023

Indonesia Partner Experience of the Year

Acara:
The Asian Experience Awards 2023

Penyelenggara:
The Asian Business Review

Tanggal:
5 Oktober 2023

The Most Committed Human Capital Leader 2023 – Bpk. Nixon L.P. Napitupulu

Acara:
TOP Human Capital Awards 2023

Penyelenggara:
TOP Business

Tanggal:
19 Oktober 2023

Best of All By Audience, Activity, Engagement

Acara:
KIP Awards 2023

Penyelenggara:
BUMN Track

Tanggal:
27 Oktober 2023

Gold Rank

Acara:
ASRRAT 2023

Penyelenggara:
National Center for Corporate Reporting (NCCR)

Tanggal:
6 November 2023





The Most Active Bank in Transformation and Digital Innovation 2023

Acara:
TOP 20 Financial Institutions 2023

Penyelenggara:
The Finance

Tanggal:
14 November 2023

The Best Mortgage Innovation

Acara:
CSA Awards 2023

Penyelenggara:
CSA Community

Tanggal:
23 November 2023

5 STARS DIAMOND The Best Human Capital Women Leader of The Year (Rahmayati)

Acara:
Human Capital & Performance Awards 2023

Penyelenggara:
BusinessNews, Cooperation with FHCI, IICD, IIPG, HC Institute USA, UI.

Tanggal:
29 November 2023

5 STARS DIAMOND The Best Digital Transformation Strategy 2023 (Banking Industries)

Acara:
Human Capital & Performance Awards 2023

Penyelenggara:
Business News, Cooperation with FHCI, IICD, IIPG, HC Institute USA, UI.

Tanggal:
29 November 2023

The High Performing Board of Commissioners on GRC 2023

Acara:
TOP GRC AWARDS 2023

Penyelenggara:
TOP GRC

Tanggal:
29 November 2023

Top GRC Awards 2023 5 Stars

Acara:
TOP GRC AWARDS 2023

Penyelenggara:
TOP GRC

Tanggal:
29 November 2023

The Highest Profit Growth of Sharia Unit Business Bank

Acara:
TOP 20 Financial Institutions 2023

Penyelenggara:
The Finance

Tanggal:
14 November 2023

Juara 1 Perusahaan BUMN Keuangan Kategori: Perusahaan BUMN Keuangan

Acara:
Annual Report Award 2022

Penyelenggara:
Annual Report Award 2022

Tanggal:
27 November 2023

5 STARS DIAMOND The Best Human Capital Team of The Year (Banking Industries)

Acara:
Human Capital & Performance Awards 2023

Penyelenggara:
BusinessNews, Cooperation with FHCI, IICD, IIPG, HC Institute USA, UI.

Tanggal:
29 November 2023

5 STARS DIAMOND The Best Human Capital Director of The Year (Eko Waluyo)

Acara:
Human Capital & Performance Awards 2023

Penyelenggara:
BusinessNews, Cooperation with FHCI, IICD, IIPG, HC Institute USA, UI.

Tanggal:
29 November 2023

Nixon L. P. Napitupulu as The Most Committed GRC Leader 2023

Acara:
TOP GRC AWARDS 2023

Penyelenggara:
TOP GRC

Tanggal:
29 November 2023

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dengan Predikat Leadership AA

Acara:
ESG Disclosure Transparency Awards 2023

Penyelenggara:
Investortrust

Tanggal:
29 November 2022



Nixon L. P. Napitupulu Bankers of the Year 2023

Acara:
Bankers of The Year 2023

Penyelenggara:
Infobank

Tanggal:
5 Desember 2023

Setiyo Wibowo The Next 200 Leaders

Acara:
Bankers of The Year 2023

Penyelenggara:
Infobank

Tanggal:
5 Desember 2023

The Best IT For Public Company – 2023 Platinum Award (A) Very Excellent – Category: Bank

Acara:
Indonesia Information Technology Award V 2023

Penyelenggara:
Economic Review

Tanggal:
08 Desember 2023

Platinum Winner - Digital Branding

Acara:
BUMN Branding and Marketing Awards 2023

Penyelenggara:
BUMN Track

Tanggal:
13 Desember 2023

Gold Winner - Brand Communication & Activation

Acara:
BUMN Branding and Marketing Awards 2023

Penyelenggara:
BUMN Track

Tanggal:
13 Desember 2023

Badan Publik Informatif

Acara:
Anugrah Keterbukaan Informasi Publik 2023

Penyelenggara:
Komisi Informasi Pusat

Tanggal:
19 Desember 2023

Nixon L. P. Napitupulu Top 100 CEO

Acara:
Bankers of The Year 2023

Penyelenggara:
Infobank

Tanggal:
5 Desember 2023

Benny Yoslim The Next 200 Leaders

Acara:
Bankers of The Year 2023

Penyelenggara:
Infobank

Tanggal:
5 Desember 2023

The Best CMO Branding & Marketing - Creative Marketing Initiative

Acara:
BUMN Branding and Marketing Awards 2023

Penyelenggara:
BUMN Track

Tanggal:
13 Desember 2023

Platinum Winner - Impactful Innovation Technology

Acara:
BUMN Branding and Marketing Awards 2023

Penyelenggara:
BUMN Track

Tanggal:
13 Desember 2023

Gold Winner - Brand Sensitivity

Acara:
BUMN Branding and Marketing Awards 2023

Penyelenggara:
BUMN Track

Tanggal:
13 Desember 2023





SERTIFIKASI

ISO 9001:2015

Validasi:

15 September 2020 – 11 Agustus 2023

Penerima Sertifikasi:

Internal Audit Division

Dikeluarkan Oleh:

SGS

ISO 9001:2015

Validasi:

6 April 2022 - 19 Oktober 2024

Penerima Sertifikasi:

Compliance and Governance Division (CMGD)

Dikeluarkan Oleh:

SGS

ISO 37001:2016

Validasi:

21 Desember 2022 – 20 Desember 2025

Penerima Sertifikasi:

Unit SME Restructuring Kantor Wilayah 1

Dikeluarkan Oleh:

Komite Akreditasi Nasional

ISO 37001:2016

Anti Bribery Management System

Validasi:

28 Desember 2023 – 27 Desember 2026

Penerima Sertifikasi:

Small Medium Enterprises Banking Division (SMBD)

Dikeluarkan Oleh:

Komite Akreditasi Nasional

ISO 27001:2013

Information System Management System

Validasi:

11 Juli 2023 – 31 Oktober 2025

Penerima Sertifikasi:

Data Center

Dikeluarkan Oleh:

BSI

ISO 37001:2016

Validasi:

11 Agustus 2020 – 10 Agustus 2023

Penerima Sertifikasi:

Commercial Banking Division (CMBD), Corporate Syndication & Transaction Banking Division (CSTD), Procurement & Fixed Asset Management Division (PFAD)

Dikeluarkan Oleh:

Komite Akreditasi Nasional

Sertifikat Indi 4.0 Level 3

Validasi:

18 Juli 2022 – 18 Juli 2025

Penerima Sertifikasi:

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Dikeluarkan Oleh:

Kementerian Perindustrian

ISO 37001:2016

Validasi:

21 Desember 2022 – 20 Desember 2025

Penerima Sertifikasi:

Commercial Credit Risk Division

Dikeluarkan Oleh:

Komite Akreditasi Nasional

ISO 37301:2021

Sistem Manajemen Kepatuhan

Validasi:

23 Januari 2023 - 22 Januari 2026

Penerima Sertifikasi:

Compliance and Governance Division (CMGD)

Dikeluarkan Oleh:

BSI

ISO 9001:2015

Information System Management System

Validasi:

19 Maret 2021 – 6 Januari 2024

Penerima Sertifikasi:

Non Subsidized Mortgage and Personal Lending Division

Dikeluarkan Oleh:

SGS



Informasi pada Situs Web Perseroan —

Perseroan memiliki situs web resmi dengan alamat www.btn.co.id. Situs web ini berisi informasi terkini tentang korporasi Perseroan, baik itu *login E-Banking* bagi nasabah, informasi seputar korporasi dan produk-produk Perseroan, profil, pengelolaan organisasi dan transparansi Tata Kelola Perusahaan yang Baik, hingga berita terkini. Situs web ini menjadi portal yang dapat diakses secara terbuka, dengan tujuan memberikan informasi yang komprehensif tentang Perseroan kepada khalayak luas.

Perseroan berkomitmen untuk terus mengembangkan situs web sebagai bagian dari transparansi informasi kepada publik.





ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERSEROAN



“

Pada tahun 2023 sesuai dengan fase *Transformation Journey* Perseroan pada tahun 2023 yaitu “Disrupsi Digital Untuk Menguasai Ekosistem Perumahan”. Perseroan berhasil melampaui target laba yang ditetapkan, laba bersih di tahun 2023 terealisasi sebesar Rp3,50 triliun dengan pertumbuhan 14,97% (yoy), peningkatan tersebut disebabkan oleh berhasilnya strategi Perseroan dalam memperbaiki kualitas kredit, ekspansi kredit *high yield* dan optimalisasi pendapatan operasional selain bunga.



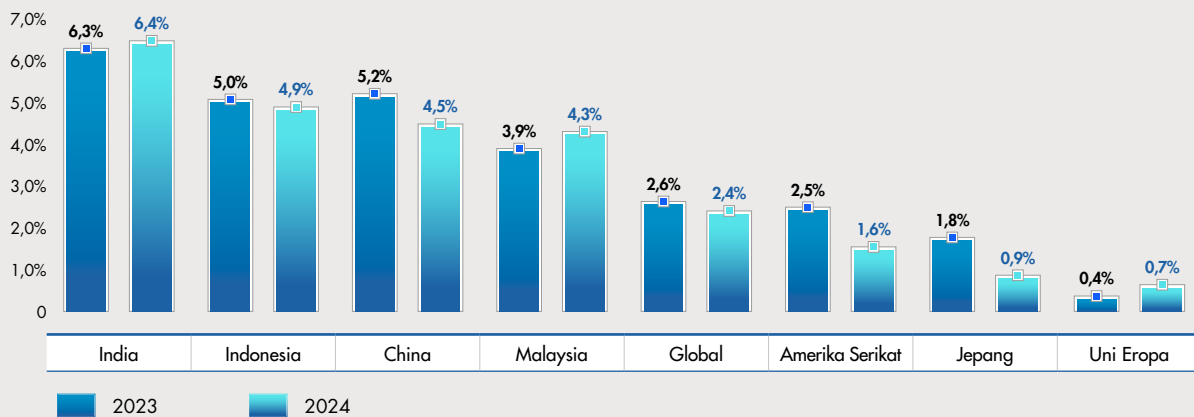
Tinjauan Perekonomian

Analisis Perekonomian Global

Pada tahun 2023, kondisi ekonomi global sedikit tertahan sebagai dampak dari ketegangan politik Rusia dan Ukraina. Hal ini menyebabkan naiknya harga komoditas dan energi, yang menyebabkan inflasi yang mendorong Bank Sentral dari banyak negara menaikkan suku bunga acuannya untuk mengendalikan inflasi di masing-masing negara. Menjelang akhir tahun 2023 kondisi ekonomi global menunjukkan perbaikan, inflasi dan suku bunga acuan di beberapa negara perlahan diturunkan. Sebaliknya, pada tahun 2024, ekonomi negara berkembang seperti Indonesia dan India diperkirakan akan tetap tumbuh melebihi capaian tahun 2023. Untuk ekonomi pada negara maju seperti Amerika Serikat dan Jepang diperkirakan akan tumbuh lebih lambat dibandingkan tahun 2023. Ekonomi Tiongkok pada tahun 2024 juga diperkirakan akan melambat.

Hingga Desember 2023, The Fed telah menaikkan suku bunga acuannya menjadi 5,50% atau mencapai 525 bps sejak Februari 2022. Kenaikan Federal Funds Rate (FFR) yang agresif ini diperkirakan akan tetap tinggi dengan siklus yang lebih panjang mendorong tetap kuatnya mata uang dolar Amerika Serikat (AS) sehingga memberikan tekanan pelemahan nilai tukar di berbagai negara. Tekanan pelemahan nilai tukar tersebut semakin meningkat sejalan dengan tingginya ketidakpastian pasar keuangan global. Aliran keluar investasi portofolio asing menambah tekanan nilai tukar di negara berkembang, termasuk Indonesia. Pada Januari 2024, World Bank menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2023 menjadi 2,6% dan sedikit menurun ke level 2,4% untuk tahun 2024. Kondisi tersebut didorong oleh tingkat inflasi di negara maju yang masih berada di atas target dengan tekanan yang mulai mereda. Dengan perkembangan inflasi ini, suku bunga kebijakan moneter termasuk FFR diperkirakan tetap bertahan tinggi dalam jangka waktu yang lama (*higher for longer*).

Grafik Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Global tahun 2023 dan 2024
(dalam %)



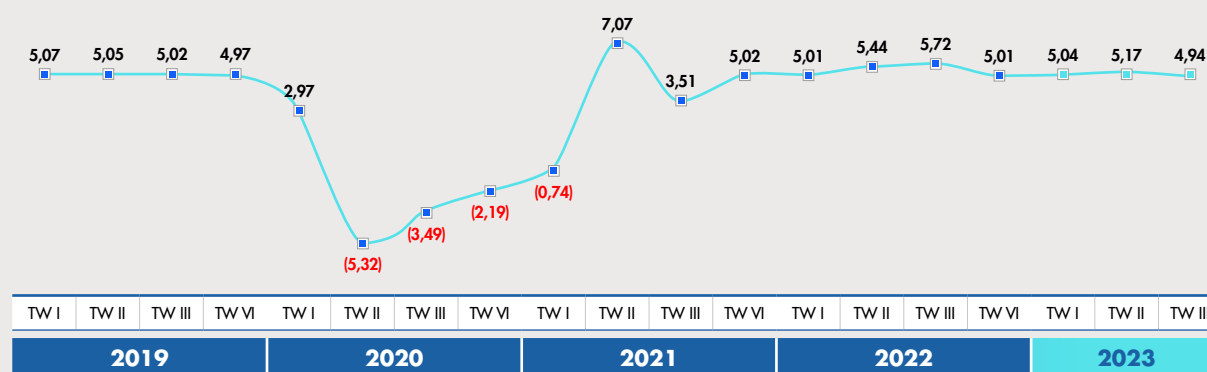
Analisis Perekonomian Indonesia

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Triwulan III tahun 2023 kembali mencatatkan hasil positif sebesar 4,94% yoy, sedikit lebih rendah jika dibandingkan triwulan sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di bawah 5%, setelah telah tujuh triwulan berturut-turut mencatatkan capaian di atas 5%. Hal ini menandakan ekonomi Indonesia semakin pulih dan

solid. Dari sektoral, pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor Transportasi dan Pergudangan, disusul sektor Jasa lainnya. Sementara dari sisi pengeluaran, komponen Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRM) mengalami pertumbuhan paling tinggi disusul komponen Investasi/PMTB serta konsumsi rumah tangga.

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia sampai dengan Triwulan III 2023

(dalam %)



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), November 2023

Perbaikan ekonomi nasional diperkirakan akan terus berlanjut hingga Triwulan IV tahun 2023. Perkembangan *leading indicators* hingga Desember 2023 masih menunjukkan hasil yang positif, seperti Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang masih tinggi sebesar 123,8, PMI Manufaktur yang masih berada pada level ekspansi sebesar 52,3 serta Indeks Penjualan Riil yang mencapai 217,9. Pada Januari 2024, *World Bank* tetap mempertahankan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2023 sebesar 5,0% dan proyeksi untuk 2024 menjadi sebesar 4,9%. Hal ini dipicu oleh masih berlanjutnya tekanan inflasi global serta ketidakpastian pasar keuangan global yang menyebabkan perlambatan ekonomi nasional. Sementara di sisi moneter, setelah BI mempertahankan suku bunga sebesar 5,75% selama 8 (delapan) bulan berturut-turut, BI menaikkan suku bunga acuannya sebesar 25 bps menjadi 6,00% pada Oktober 2023 untuk memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah. Selain itu, kenaikan ini juga sebagai langkah *pre-emptive* dan *forward looking* untuk memitigasi dampaknya terhadap inflasi barang impor, sehingga inflasi umum dan inti tetap terkendali dalam sasaran Bank Indonesia.

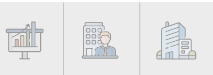
Pertumbuhan ekonomi nasional masih melanjutkan tren positifnya pada Triwulan IV 2023. Secara keseluruhan, Pemerintah memperkirakan ekonomi Indonesia akan tumbuh sebesar 4,8%-5,2% yoy pada akhir tahun 2023 didukung oleh beberapa insentif kebijakan di akhir tahun untuk mendukung konsumsi rumah tangga. Tingkat inflasi baik umum maupun inti tetap terkendali dengan adanya koordinasi Bank Indonesia, Pemerintah Pusat dan Daerah yang menyebabkan tingkat inflasi tetap terjaga pada level $3,0\% \pm 1,0\%$ pada akhir tahun 2023. Sementara itu, nilai tukar Rupiah masih dipengaruhi oleh dinamika yang terjadi pasar global sehingga tekanan terhadap Rupiah masih berlanjut dan kurs Rupiah terhadap Dollar AS berada di level 15.399 pada akhir tahun 2023.

Analisis Industri Perbankan

Otoritas Jasa Keuangan mencatat Kinerja sektor jasa keuangan khususnya perbankan pada 2023 masih solid dengan indikator permodalan dan likuiditas yang tersedia serta risiko kredit yang terjaga. Fungsi intermediasi perbankan pada bulan November 2023 kembali mencatatkan tren peningkatan dengan kredit tumbuh sebesar 9,74% yoy. Pertumbuhan ini terutama ditopang oleh kredit modal kerja yang tumbuh 10,14% yoy. Adapun secara bulanan, pertumbuhan nominal kredit perbankan naik sebesar Rp63 triliun menjadi Rp6.966 triliun. Sementara itu, Dana Pihak Ketiga (DPK) pada November 2023 tercatat tumbuh sebesar 3,04% yoy menjadi Rp8.216 triliun, dengan laju pertumbuhan meningkat, terutama didorong oleh peningkatan deposito sebesar 3,50% yoy. Risiko kredit melanjutkan penurunan dengan rasio NPL perbankan sebesar 2,36%. Di sisi lain, kredit restrukturisasi Covid-19 kembali mencatatkan penurunan sebesar Rp15,84 triliun menjadi Rp285,32 triliun, dengan jumlah nasabah juga menurun menjadi 1,14 juta nasabah setelah pada Oktober 2023 tercatat sebesar 1,22 juta nasabah.

Likuiditas industri perbankan pada November 2023 dalam level yang memadai dengan rasio-rasio likuiditas yang terjaga. Rasio Alat Likuid/*Non-Core Deposit* (AL/NCD) sebesar 115,73%, meningkat dibandingkan Oktober 2023 yang sebesar 117,29% atau jauh di atas ambang batas ketentuan yang sebesar 50%. Sementara Alat Likuid/DPK (AL/DPK) sebesar 26,04%, meningkat dibandingkan capaian pada Oktober 2023 yang sebesar 26,36%, masih di atas ambang batas ketentuan yang sebesar 10%. Sementara, Posisi Devisa Neto (PDN) November 2023 tercatat sebesar 1,58%, juga jauh di bawah *threshold* sebesar 20%. Sementara dari sisi permodalan, *Capital Adequacy Ratio* (CAR) industri Perbankan pada November 2023 tercatat meningkat menjadi 27,89% dari posisi Oktober 2023 yang sebesar 27,44%.

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, November 2023.



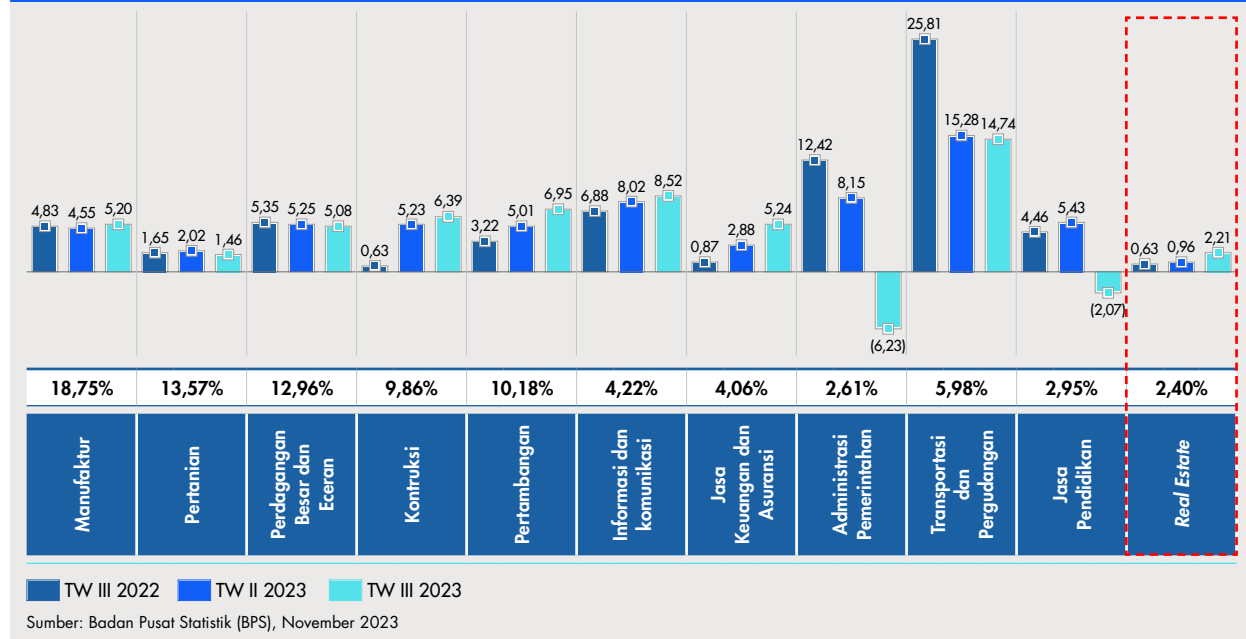
Analisis Industri Perumahan

Sektor *Real Estate* kembali mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 2,21% yoy pada Triwulan III tahun 2023, menguat jika dibandingkan pertumbuhan Triwulan II 2022 yang sebesar 0,96% yoy. Sektor *Real Estate* merupakan salah satu sektor yang tetap mencatatkan pertumbuhan positif walaupun kondisi perekonomian

terkontraksi di masa pandemi. Sektor perumahan masih memiliki ruang untuk tumbuh yang sangat besar mengingat masih tingginya angka *backlog* perumahan nasional dan tingginya jumlah masyarakat yang belum memiliki rumah yang layak.

Grafik Pertumbuhan PDB Sektoral

(dalam %)

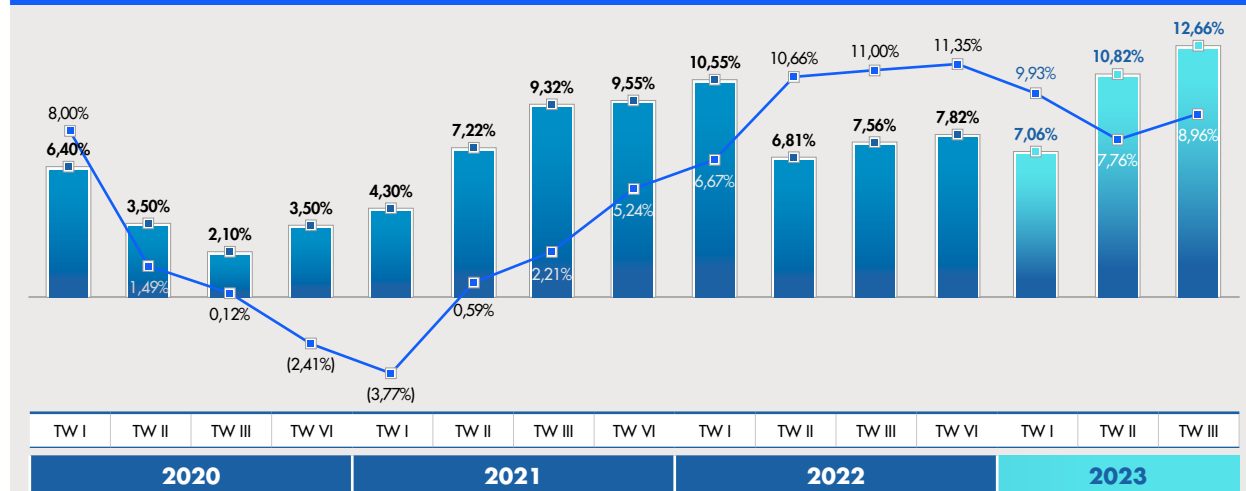


Perpanjangan stimulus Pemerintah di bidang perumahan mendorong permintaan rumah pada tahun 2023. Stimulus tersebut antara lain pelonggaran Rasio *Loan to Value/Financing to Value* (LTV/FTV) Kredit/Pembiayaan Properti menjadi maksimal 100% untuk semua jenis properti serta kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP) yang mulai berlaku November 2023. Besarnya dukungan Pemerintah

ini dapat terlihat pada pertumbuhan KPR Nasional hingga Triwulan III 2023 telah tumbuh mencapai 12,66% yoy, sehingga pertumbuhan KPR terus mencapai 2 (dua) *digit* sejak Triwulan II 2023. Sedangkan pertumbuhan total kredit nasional tumbuh menjadi 8,96% yoy, meningkat dibandingkan Triwulan II 2023 yang sebesar 7,76% yoy.

Pertumbuhan Total Kredit dan Total KPR sampai dengan Triwulan III 2023

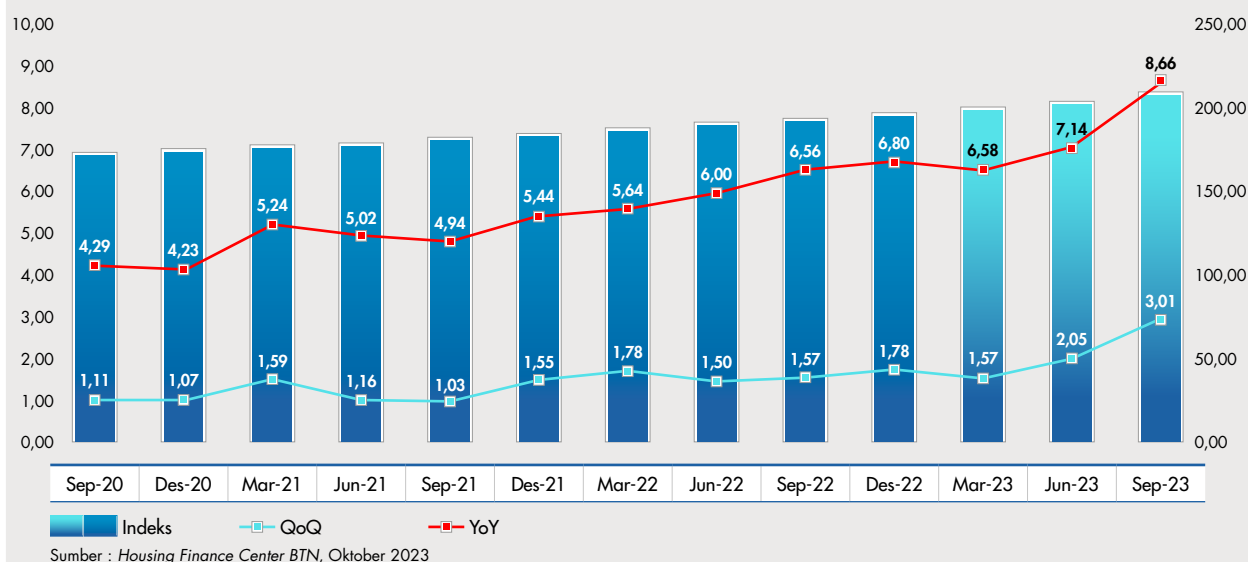
(dalam %)



Housing Finance Center Perseroan merilis Indeks Harga Rumah (House Price Index/HPI) pada Triwulan III 2023, dengan indeks sebesar 211,86 dan pertumbuhan menguat sebesar 8,66% yoy. Pertumbuhan BTN HPI didukung oleh pertumbuhan di semua tipe rumah yaitu rumah tipe kecil (21 m²–36 m²), rumah

tipe menengah (37 m²–45 m²) dan tipe besar (46 m²–70 m²). Pertumbuhan indeks harga rumah ini mencerminkan tetap tingginya permintaan rumah di tanah air di tengah pertumbuhan ekonomi nasional yang terus meningkat seiring kembalinya aktivitas ekonomi masyarakat.

Grafik Pertumbuhan Harga Rumah menurut House Price Index Triwulan III 2023

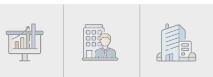


Analisis Posisi Perseroan Dalam Industri Perbankan

Untuk menggambarkan posisi Perseroan di antara perbankan nasional per November 2023 dapat disampaikan pada penjelasan sebagai berikut:

Tabel Perbandingan Kinerja Perbankan November 2023

No	Nama Bank	Aset				
		November 2023	Desember 2022	November 2022	△ YTD	△ YOY
1	BRI	1.774	1.751	1.679	1,31%	5,65%
2	Mandiri	1.628	1.570	1.502	3,67%	8,36%
3	BCA	1.354	1.283	1.283	5,54%	5,61%
4	BNI	977	998	976	(2,10%)	0,11%
5	BTN	423	402	398	5,30%	6,53%
	Posisi Desember 2023	439				
6	CIMB NIAGA	324	302	300	7,32%	7,78%
7	BSI	320	306	284	4,83%	12,86%
8	OCBC NISP	253	239	233	6,17%	8,51%
9	Panin	188	194	187	(2,95%)	0,41%
10	Danamon	193	184	177	5,18%	8,87%
11	BTPN	176	189	185	(6,95%)	(4,93%)
12	Permata	245	255	240	(4,15%)	1,76%



No	Nama Bank	Aset				
		November 2023	Desember 2022	November 2022	△ YTD	△ YOY
13	Maybank	157	149	160	5,32%	(1,92%)
14	BJB	169	170	168	(0,80%)	0,77%
15	UOB	160	138	141	15,40%	13,52%
16	Mega	118	142	133	(17,01%)	(11,81%)

No	Nama Bank	Kredit dan Pembiayaan				
		November 2023	Desember 2022	November 2022	△ YTD	△ YOY
1	BRI	1.161	1.030	1.014	12,76%	14,48%
2	Mandiri	1.046	933	920	12,16%	13,65%
3	BCA	758	691	680	9,74%	11,47%
4	BNI	666	643	626	3,71%	6,48%
5	BTN	328	298	296	9,93%	10,93%
	Posisi Desember 2023	334				
6	CIMB NIAGA	200	191	190	4,63%	5,10%
7	BSI	234	207	205	13,17%	14,09%
8	OCBC NISP	149	137	136	8,75%	9,53%
9	Panin	125	120	120	3,57%	3,63%
10	Danamon	139	122	119	14,23%	16,73%
11	BTPN	142	135	137	5,24%	3,18%
12	Permata	139	136	136	1,90%	2,28%
13	Maybank	101	96	97	5,42%	4,35%
14	BJB	114	108	108	5,61%	5,71%
15	UOB	82	86	83	(4,54%)	(1,41%)
16	Mega	64	70	69	(8,41%)	(6,11%)

No	Nama Bank	Dana Pihak Ketiga				
		November 2023	Desember 2022	November 2022	△ YTD	△ YOY
1	BRI	1.297	1.301	1.234	(0,32%)	5,09%
2	Mandiri	1.194	1.195	1.127	(0,08%)	5,97%
3	BCA	1.073	1.025	1.025	4,74%	4,70%
4	BNI	733	763	743	(3,95%)	(1,41%)
5	BTN	330	322	322	2,59%	2,62%
	Posisi Desember 2023	350				
6	CIMB NIAGA	238	228	227	4,34%	4,43%
7	BSI	268	261	248	2,32%	8,09%
8	OCBC NISP	180	176	175	1,97%	2,63%
9	Panin	131	131	128	(0,04%)	2,46%
10	Danamon	131	126	119	4,08%	9,54%
11	BTPN	101	103	99	(1,49%)	2,71%
12	Permata	171	196	180	(12,35%)	(4,65%)

No	Nama Bank	Dana Pihak Ketiga				
		November 2023	Desember 2022	November 2022	△ YTD	△ YOY
13	Maybank	113	106	114	6,57%	(0,73%)
14	BJB	124	122	123	2,22%	0,94%
15	UOB	121	114	116	6,63%	4,35%
16	Mega	85	103	93	(17,77%)	(9,35%)

Hingga November 2022, Perseroan tetap mengukuhkan sebagai Bank terbesar ke-5 dari sisi aset. Adapun aset Perseroan hingga bulan November 2023 mencapai Rp423 triliun, atau mengalami pertumbuhan sebesar 6,53% yoy. Kenaikan ini juga terjadi pada sisi kredit dan pembiayaan serta dana pihak ketiga Perseroan hingga bulan November 2023. Kredit dan pembiayaan tumbuh 10,93% yoy menjadi Rp328 triliun dan dana pihak ketiga tumbuh 2,62% yoy menjadi Rp330 triliun.

Perseroan menghadapi persaingan dalam seluruh lini bisnis yang dijalani. Pesaing utama Perseroan adalah bank-bank domestik, dan dalam cakupan yang lebih sempit, bank-bank asing yang beroperasi di Indonesia. Untuk kredit perumahan, kompetitor utama Perseroan adalah bank-bank domestik karena bank-bank asing tidak diperkenankan memberikan kredit perumahan. Sebagai akibat dari krisis keuangan global, persaingan untuk mendapatkan pendanaan khususnya pendanaan ritel yang menawarkan biaya pendanaan yang lebih murah menjadi semakin intens. Perseroan biasanya bersaing dengan bank-bank lain terutama dalam hal ekstensi dan kenyamanan saluran distribusi, rentang produk, harga, pelayanan nasabah dan pencadangan untuk jasa teknologi.

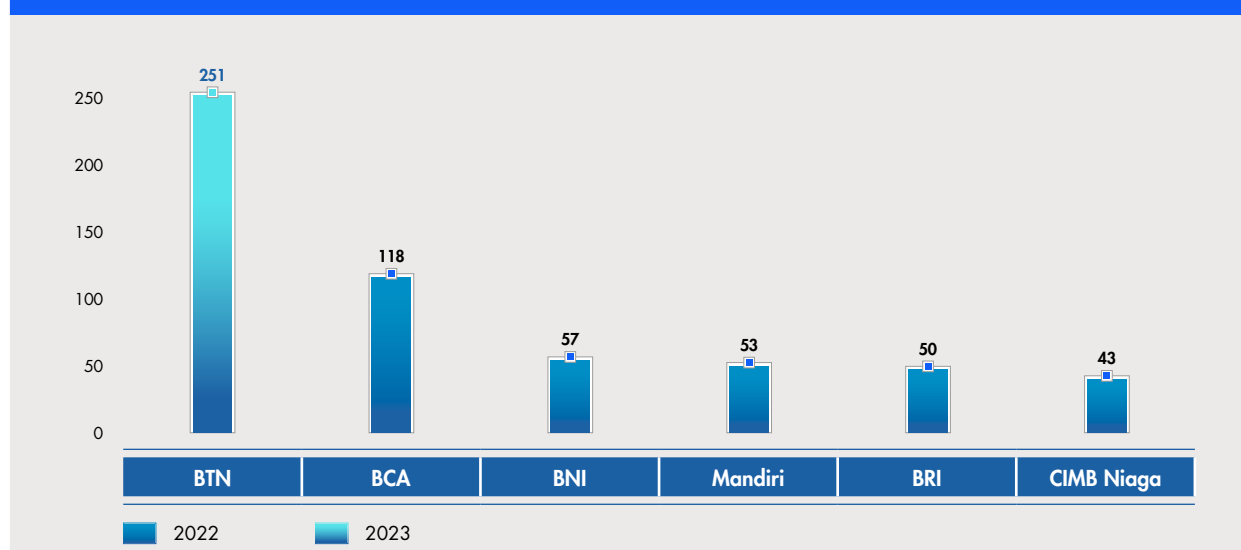
Selain itu, secara tidak langsung Perseroan menghadapi persaingan dari bank-bank asing. Beberapa kompetitor

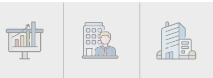
secara substansial lebih besar dari Perseroan, memiliki sumber keuangan dan sumber lain yang lebih besar serta jaringan kantor cabang dan ATM yang lebih luas. Sebagai tambahan, pada tahun 1999, pemerintah Republik Indonesia telah menghapus batas kepemilikan bank asing dan mengizinkan bank-bank asing membuka kantor cabang di Indonesia. Persaingan dari bank-bank yang lebih dulu beroperasi dan bank baru baik domestik maupun asing, di mana bank asing dapat menerapkan *joint venture* atau investasi di bank-bank domestik, dapat mengakibatkan dampak yang negatif bagi kondisi operasional dan keuangan Perseroan.

Karena pembangunan dan reformasi sektor keuangan Indonesia terus berlanjut, Perseroan kemungkinan akan menghadapi persaingan dari sejumlah lembaga keuangan yang menawarkan produk dan jasa perbankan yang lebih luas atau peminjaman dengan limit yang lebih besar atau memiliki sumber daya finansial dan lainnya yang lebih besar daripada Perseroan. Banyak lembaga keuangan akan bersaing untuk mendapat target nasabah yang sama dengan target Perseroan, dan banyak institusi yang memiliki akses kepada pemerintah atau grup bisnis dengan sumber finansial yang lebih besar. Beberapa kompetitor Perseroan telah, dan diprediksi akan, membentuk aliansi strategis dengan beberapa bank asing dengan sumber daya manajemen dan finansial yang secara signifikan lebih besar.

Grafik Perbandingan Outstanding KPR Bank di Indonesia

(dalam triliun Rupiah)





Tinjauan Operasional

Rencana Strategis Bank

Rencana strategis bank meliputi strategi jangka pendek dan menengah serta strategi jangka panjang bank.

Strategi Jangka Pendek dan Menengah

Bidang Perkreditan

Inisiatif untuk mengembangkan bisnis kredit pada jangka pendek dan menengah yaitu:

1. **Mengembangkan Program Kepemilikan Hunian Yang Terjangkau Untuk Mendukung Program Perumahan Nasional**
 - a. Mengoptimalkan porsi Perseroan pada kuota KPR Subsidi FLPP dan TAPERA.
 - b. Mengembangkan skema KPR *Rent to Own* sebagai skema KPR yang *affordable* dan *equitable*, yang menasar generasi milenial.
 - c. Mengembangkan skema pendanaan untuk penyediaan perumahan yang terjangkau.
 - d. Kemitraan untuk pendanaan proyek perumahan segmen millenial dan urban.
 - e. Pembangunan proyek perumahan milenial dengan harga terjangkau dan memiliki fasilitas lengkap (*working space*, *walkable*/dekat ke mana-mana) melalui pembangunan *Transit Oriented Development* (TOD).
2. **Mengembangkan Pangsa Pasar KPR di Segmen *Emerging Affluent* dan *Affluent***
 - a. Membentuk *sales center* yang fokus pada penjualan KPR kepada segmen *emerging affluent* yang pada tahun 2023 telah dilakukan pembukaan *sales center* di Jakarta-Kelapa Gading Square, Tangerang-BSD dan Surabaya.
 - b. Program kerja sama dan *marketing* dengan agen properti nasional dan individu, sebagai strategi *Direct to Customer* (D2C).
 - c. Mengembangkan kerja sama dengan *developer* untuk mengembangkan proyek perumahan di segmen *emerging affluent*.
 - d. Memperkuat aplikasi dan portal BTN Properti dengan digitalisasi proses KPR secara *end to end*, baik untuk konsumen dan pengembang.
 - e. Membuat *one-stop-shop* ekosistem perumahan untuk di *life-cycle* nasabah.
 - f. Membangun *platform instant purchase* sebagai bagian BTN Properti.
3. **Peningkatan Kredit *High Yield Margin***
 - a. Meningkatkan kredit *high yield* (KRING, KAR, KUR) *beyond mortgage* melalui program *up-selling* dan *cross selling* kepada nasabah *captive*, kawasan perkantoran dan industri.

- b. Program *upselling* dan *cross selling* produk non subsidi kepada nasabah KPR Subsidi yang sudah atau hampir lunas melalui kapabilitas *analytics* dan program *upselling*.
- c. *Pre approved* pinjaman atau kredit kepada debitur eksisting yang memenuhi kriteria melalui *Eagle Project* dan *Ultimate Project* (KAR dan KRING)

4. **Memperluas Value Chain Real Estate Yang Menasar UMKM dan Kontraktor.**

- a. Membentuk sentra kredit UMKM sebagai inisiatif untuk mendukung ekspansi kredit SME, terutama KUR.
- b. *Cross selling Supply Chain Financing* (SCF), Bank Garansi (BG), Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) dan *e-Banking* di nasabah SME, Komersial, Korporasi dan Instansi.
- c. Meningkatkan penyaluran KUR kepada nasabah *captive* baik debitur wiraswasta, KPR Subsidi dan KPR Non Subsidi.

Bidang Kualitas Kredit dan Pembiayaan

Inisiatif untuk perbaikan bisnis bidang kualitas kredit dan pembiayaan pada jangka pendek dan menengah adalah sebagai berikut:

1. **Melanjutkan Inisiatif Perbaikan Proses Bisnis Kredit**
 - a. Optimalisasi *Regional Loan Processing Center* (RLPC).
 - b. Implementasi *Commercial Banking Center* (CBC).
 - c. Melanjutkan perbaikan proses bisnis perkreditan, terutama di Segmen Komersial dan SME.
2. **Meningkatkan Kualitas dan Efektivitas Collection**
 - a. Standardisasi proses restrukturisasi kredit.
 - b. Memperbaiki *collection management*.
 - Implementasi *collection scoring*.
 - *Monitoring* produktivitas Tenaga Alih Daya (TAD) *collection*, *iColl usage* dan *contact rating*.
 - Memperbaiki proses bisnis restrukturisasi kredit SME dan Komersial.
 - c. Mengembangkan *early warning system*.
 - d. Optimalisasi kerja sama dengan *lawyer*, *Regional Legal Representative* (RLR), pengadilan dan BPN.
3. **Mempercepat Penyelesaian Kredit Macet Secara Bulk (Strategi Aset Sales)**
 - a. Penjualan melalui investor atau mitra.
 - b. Penawaran kepada calon investor/mitra melalui *small gathering* di masing-masing kantor wilayah atau kantor cabang yang memiliki *outstanding* NPL besar (pareto).
 - c. Penjualan melalui *bulk sales*.
 - d. Penawaran kepada calon investor/mitra yang dilakukan secara *bulk* kepada satu pihak.
 - e. Penyelesaian kredit komersial melalui litigasi.

- f. Koordinasi unit kerja *assets sales management* dengan unit legal untuk melakukan litigasi terhadap debitur-debitur yang berpotensi dapat dilakukan *recovery*.
- g. Penjualan melalui portal rumah murah Perseroan (www.rumahmurahbtn.co.id).
- h. Memaksimalkan penjualan melalui *digital platform* agar dapat memberikan *awareness* secara masif kepada khalayak dengan harapan dapat menarik minat calon pembeli.

Bidang Pendanaan

Inisiatif untuk mengembangkan bisnis bidang pendanaan pada jangka pendek dan menengah adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan Kapabilitas Sebagai Bank Transaksional dan Channel Transaksi

- a. Mengoptimalkan produktivitas jaringan kantor yang berada di *area target market* (perkantoran, pertokoan dan pusat perbelanjaan).
- b. Meningkatkan produktivitas *sales* melalui pengembangan BTN Smart.
- c. Program dan strategi *campaign* tabungan melalui aktivitas *marketing communication* yang terintegrasi pada segmen menengah dan debitur KPR Non Subsidi.
- d. Program akuisisi dan penjualan produk *bundling* kepada korporasi BUMN.
- e. Akuisisi Tabungan BTN Bisnis untuk nasabah dan mitra segmen SME dan Komersial.
- f. Meningkatkan akuisisi Tabungan BTN Investa pada nasabah prioritas untuk meningkatkan CASA pada segmen segmen *High Network Income* (HNW)

2. Menjadi Bank Operasional Pengelolaan Dana Institusi

- a. Meningkatkan akuisisi satuan kerja (satker) pemerintah dan interkoneksi SPAN.
- b. Meningkatkan akuisisi dan utilisasi *cash management* pada nasabah lembaga dan korporasi.
- c. Program akuisisi nasabah *payroll* melalui penjualan produk *bundling* (Program BTN Solusi).
- d. Mengembangkan *customer base* melalui pendekatan ekosistem bisnis yang berfokus pada sektor *property related, healthcare, perdagangan, education* dan kawasan industri.
- e. Mengembangkan *retail and wholesale transaction* melalui program akuisisi dan aktivasi *mobile banking*, kartu debit, EDC, QRIS, *cash management* serta *trade service*.

Bidang Pendapatan Operasional Lainnya dan Pembentukan Anak Perusahaan

Pendapatan Operasional Lainnya

Untuk meningkatkan profitabilitas, rencana bisnis Perseroan pada tiga tahun ke depan juga difokuskan untuk meningkatkan Pendapatan Operasional Lainnya (POL) yang sebagian besar bersumber dari *fee based income*, terutama pada sumber-sumber

baru yang berbasis transaksi dan layanan, dengan target sebagai berikut:

1. Mengembangkan Fee dari Digital and Transaction Banking

- a. Percepatan pengembangan fitur-fitur pada *new mobile banking* Perseroan.
- b. Percepatan implementasi *digital on boarding* untuk meningkatkan DPK Ritel.
- c. Mengembangkan *Cash Management System* (CMS) untuk pengajuan *cash collateral* dan bank garansi secara online untuk mengembangkan fee dari segmen *transaction banking*.

2. Mengembangkan Fee Based dari Sumber-Sumber Baru

- a. Membentuk unit kerja khusus yang mengelola *wholesale and transaction banking* untuk meningkatkan wallet dari segmen komersial, *wholesale* dan korporasi.
- b. Mengembangkan fee dari segmen prioritas, terutama pada layanan valas (*market link deposit, deposito swap forex, dan lainnya*).
- c. Memperbaiki profitabilitas *treasury* dari pengelolaan portofolio *Available for Sale* (AFS) dan *Hold to Maturity* (HTM), melalui:
 - Fokus portofolio HTM pada sebaran portofolio yang memiliki tenor jangka pendek, maksimal di 10 tahun.
 - Rekomposisi portofolio AFS menjadi lebih pendek dan diupayakan maksimal di 10 tahun.
 - Diversifikasi tenor portofolio AFS dan HTM dengan mempertimbangkan rasio likuiditas bank, arah suku bunga acuan dan perbandingan suku bunga investasi penempatan pada BI dengan *yield* SBN.
- d. Mengembangkan sumber baru perolehan *fee based treasury* melalui *trading forex* dan *structured products*.
- e. Meningkatkan fee yang bersumber dari Bank Garansi (BG), Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN), *Supply Chain Financing* (SCF), *Cash Management System* (CMS) di segmen Korporasi.

Untuk mencapai target tersebut, inisiatif strategis yang dilakukan pada jangka pendek dan menengah adalah sebagai berikut:

1. Percepatan implementasi *new mobile banking*.
2. Percepatan implementasi *digital on boarding* untuk meningkatkan DPK Ritel.
3. Mengembangkan *Cash Management System* (CMS) untuk pengajuan *cash collateral* dan bank garansi secara online untuk mengembangkan fee dari segmen korporasi.
4. Mengembangkan *fee based* dari sumber - sumber baru.
 - a. Membentuk unit kerja khusus yang mengelola *wholesale and transaction banking* untuk meningkatkan wallet dari segmen komersial, *wholesale* dan korporasi.
 - b. Mengembangkan fee dari segmen prioritas, terutama pada layanan valas (*market link deposit, deposito swap forex, dan lain-lain*).
 - c. Memperbaiki profitabilitas *treasury* dari pengelolaan portofolio *Available for Sale* (AFS) dan *Hold to Maturity* (HTM).
 - d. Rekomposisi portofolio *Available for Sale* (AFS) menjadi lebih pendek dan diupayakan maksimal di 10 tahun.



- e. Diversifikasi tenor portfolio AFS dan HTM dengan mempertimbangkan rasio likuiditas bank, arah suku bunga acuan dan perbandingan suku bunga investasi penempatan pada BI dengan *yield* SBN.
- f. Mengembangkan sumber baru perolehan *fee based treasury* melalui *trading forex* dan *structured products*.
- g. Meningkatkan *fee* yang bersumber dari Bank Garansi (BG), Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN), *Supply Chain Financing* (SCF), *Cash Management System* (CMS) di segmen korporasi.

Rencana Pendirian Anak Perusahaan

Untuk memperkuat bisnis inti bank dan inisiatif dalam mendukung sinergi BUMN, pada jangka menengah pengembangan bisnis juga dilakukan dengan rencana pendirian anak perusahaan atau strategi anorganik melalui rencana penyertaan modal di bidang manajemen investasi, perusahaan modal ventura, asuransi, pendirian anak perusahaan *multifinance* dan kerja sama untuk mengembangkan bisnis Unit Usaha Syariah (UUS). Rencana pendirian anak perusahaan Manajemen Investasi (MI) direncanakan dilakukan dengan skema penyertaan modal pengendalian langsung, dalam hal ini kandidat perusahaan yang direncanakan adalah perusahaan manajemen investasi yang merupakan salah satu anak perusahaan BUMN.

Berikutnya, memperhatikan *competitive advantage* bisnis yang kuat di perumahan yang utamanya adalah KPR, Perseroan berencana membentuk anak perusahaan asuransi jiwa atau kerugian yang merupakan strategi anorganik untuk menyediakan layanan *one stop solution* dalam memfasilitasi layanan keuangan keluarga. Rencana pendirian anak perusahaan tersebut dilakukan dengan skema penyertaan modal pengendalian langsung, dengan target calon mitra perusahaan/anak perusahaan asuransi jiwa yang telah berjalan atau pendirian baru. Selanjutnya, untuk mendukung gagasan sinergi BUMN dan sebagai *special vehicle* pada strategi pengembangan *Assets Management*, Perseroan juga berencana mendirikan anak perusahaan. Modal Ventura. Selain itu, fokus bisnis pendirian anak perusahaan di bidang ini juga ditujukan untuk penyertaan pada beberapa potensi bisnis seperti *fintech*.

Bidang Bisnis Syariah

Berdasarkan laporan The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC) yang bertajuk *The Muslim 500: The World's 500 Most Influential Muslims 2024*, Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim terbanyak di dunia. RISSC mencatat, jumlah populasi muslim di Indonesia mencapai 240,62 juta jiwa pada 2023. Jumlah ini setara 86,7% dari populasi nasional yang totalnya 277,53 juta jiwa. Sebagai negara dengan umat muslim terbesar, industri keuangan syariah Indonesia menyimpan potensi yang sangat besar. Dengan kondisi literasi dan inklusi yang terbelah rendah, total asetnya telah berada di posisi ke-7 secara global. Secara keseluruhan pertumbuhan aset keuangan syariah Indonesia telah mencapai Rp2.450,55 triliun atau sekitar

USD163,09 miliar posisi per Juni 2023. Angka ini menunjukkan pertumbuhan sebesar 13,37% (yoy) dengan *market share* sebesar 10,94% terhadap total keuangan nasional. Setelah mengalami perlambatan akibat dampak pandemi dan kondisi global yang tidak menentu, industri perbankan syariah nasional berhasil mencatatkan pertumbuhan yang cukup baik. Posisi per Juni 2023 pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia tumbuh menjadi 7,31% dari total industri perbankan nasional. Pertumbuhan tersebut ditopang oleh 13 Bank Umum Syariah, 20 Unit Usaha Syariah, dan 171 BPRS dengan sebaran porsi aset 65,78% Bank Umum Syariah, 31,68% Unit Usaha Syariah, dan BPRS sebesar 2,54%.

Selain itu, berdasarkan hasil survei nasional literasi dan inklusi keuangan tahun 2022, indeks literasi dan inklusi keuangan syariah tercatat sebesar 9,14% untuk indeks literasi dan 12,12% untuk indeks inklusi keuangan syariah. Rendahnya indeks literasi dan inklusi tentunya menjadi peluang sekaligus tantangan bagi bank syariah untuk terus mengembangkan bisnisnya. Konsep bank syariah saat ini juga relevan dengan bisnis perbankan retail seperti pembiayaan KPR maupun UMKM yang menjadi salah satu nadi perekonomian Indonesia. Sedangkan tantangan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah menyebabkan masih besarnya gap dengan industri keuangan konvensional. Hal itu meliputi pangsa pasar yang relatif masih rendah pada kisaran 11%. Masih rendahnya literasi keuangan syariah, juga berdampak pada terbatasnya laju inklusi keuangan syariah. Selain itu, terbatasnya diferensiasi model bisnis atau produk keuangan syariah, penggunaan teknologi informasi yang saat ini masih perlu ditingkatkan, serta sumber daya manusia keuangan syariah yang belum optimal. Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar mempunyai potensi untuk menjadi contoh keunggulan dalam keuangan syariah. Ambisi ini sejalan dengan upaya berkelanjutan oleh berbagai instansi untuk mendorong ekosistem keuangan yang kuat dan memiliki diversifikasi yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Perbankan syariah di Indonesia terus menunjukkan perkembangan yang positif, hal ini tidak terlepas dari pangsa pasarnya yang masih belum jenuh dan terus berkembang. Berdasarkan data statistik OJK, dalam kurun waktu tahun 2019-2022 aset perbankan syariah tumbuh 14,24% yang pertumbuhannya didominasi oleh Bank Umum Syariah (BUS). Sejalan dengan pertumbuhannya tersebut, pangsa pasar aset perbankan syariah nasional juga semakin menguat dari 6,18% di tahun 2018 menjadi 7,09% di tahun 2022.

Sejalan dengan potensi perbankan syariah nasional, Unit Usaha Syariah (UUS) Perseroan juga mengalami pertumbuhan bisnis yang searah. Hal ini ditunjukkan oleh kinerja yang terus tumbuh dan kemampuan UUS Perseroan yang tetap tumbuh di tengah tantangan pandemi. Pada posisi September tahun 2023 aset UUS Perseroan tercatat sebesar Rp48 triliun, tumbuh 16,81% (yoy). Pertumbuhan aset tersebut ditopang oleh pembiayaan sebesar Rp35,79 triliun, tumbuh 17,94% (yoy), dan penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang tercatat sebesar Rp36,25 triliun, tumbuh 16,76% (yoy).

Memperkuat Permodalan

Untuk mendukung pertumbuhan bisnis yang sehat dan berkelanjutan dibutuhkan dukungan permodalan yang kuat dengan mempertimbangkan pemenuhan kewajiban modal minimum bank sesuai Basel III. Sesuai dengan POJK Nomor 11/POJK.03/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum, bahwa bank harus menyediakan modal berupa modal minimum berdasarkan peringkat risiko dan tambahan modal sebagai penyangga berdasarkan Basel III (terdapat 3 jenis yaitu *capital conservation buffer*, *countercyclical buffer*, *capital surcharge*).

Bidang Human Capital

Dalam rangka mewujudkan “*One of Home of Indonesia’s Best Talent*”, pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pada jangka pendek dan menengah diselaraskan dengan *Corporate Plan* Tahun 2021-2025. Rencana jangka menengah bidang SDM bertujuan untuk menarik dan mempertahankan talenta terbaik yang memiliki kapabilitas unggul dan produktivitas yang tinggi. Sebagai upaya mewujudkan aspirasi tersebut, dirumuskan dimensi dan parameter sebagai berikut:

1. *Ability to Attract Top Talent*

Menjadi salah satu *top of mind employer* bagi kandidat eksternal dari perusahaan maupun universitas terkemuka di Indonesia.

2. *Ability to Retain Top Talents*

Mampu mempertahankan *top talents* untuk berkarya dan berkembang bersama Perseroan.

3. *Talent’s Capability Readiness*

Memiliki kapabilitas untuk mencapai tujuan strategis bank saat ini dan masa depan.

4. *Employee Productivity*

Memiliki produktivitas pegawai yang berada di atas rata-rata organisasi ternama.

Untuk mencapai aspirasi tersebut disusun strategi dan inisiatif strategis sebagai berikut:

Strategi

Uraian strategi dalam mencapai aspirasi bidang *human capital* yaitu:

1. Menjadi pilihan utama tempat bekerja talenta terbaik melalui perbaikan proses rekrutmen dan *onboarding* yang memberikan *employee experience* atas sistem *reward* yang memotivasi dan kompetitif dipasar, serta aktivasi *employee value proposition* bank.
2. Penguatan kapabilitas, produktivitas, dan daya saing SDM melalui perbaikan program pengembangan kapabilitas pegawai, mendukung budaya pembelajaran, penerapan *coaching* yang konsisten, serta penerapan ukuran produktivitas dalam *workforce planning* dan *performance management*.

3. Fokus pada penciptaan nilai dan menjadi *business partner* melalui penyelarasan organisasi, dan penerapan *digital human resource* untuk mendukung *operational excellence* serta implementasi internalisasi *corporate culture*.

Inisiatif

Inisiatif jangka pendek dan menengah diuraikan sebagai berikut:

INISIATIF JANGKA PENDEK

1. Mengembangkan dan implementasi *Employee Value Proposition* (EVP) untuk menarik talenta terbaik.
2. Memperbarui fokus dalam pengembangan dan retensi pegawai *talent*.
3. Implementasi struktur organisasi berbasis *Strategic Business Unit* (SBU)
4. Pemenuhan kebutuhan pegawai dengan metode *multisourcing recruitment* untuk menjaring talenta yang berkualitas khususnya bidang *funding*, *transactional*, dan *digital banking*.
5. Implementasi program suksesi dan jalur karir khusus *general management*, *funding*, *transactional* dan *digital banking*.
6. Pengembangan kompetensi pegawai, khususnya terkait *critical capability*, *leadership*, *funding*, *transactional*, dan *digital banking*.
7. Mengaktifkan implementasi Program EVP untuk meningkatkan *employee experience*.
8. Penguatan peran *change leader* untuk internalisasi *core values* pada setiap unit kerja dan mendorong perubahan perilaku.
9. Pengembangan HC *Technology* yang berfokus pada *talent management*, *people analytic* dan *employee self service* untuk meningkatkan *employee experience*.

INISIATIF JANGKA MENENGAH

1. *People Analytics and Employee Experience*
 - a. Mengembangkan kapabilitas HC *Business Partner* (HCBP) untuk menyelaraskan strategi HC dengan bisnis serta menjawab kebutuhan bank dengan implementasi HCBP pada tahap *end state* yaitu pada Level Divisi.
 - b. Menyempurnakan struktur organisasi HC dan merancang sistem *grading* yang selaras dengan kebutuhan bisnis:
 - Penguatan organisasi *learning* dan infrastruktur *learning center*.
 - Implementasi sistem *grading* baru.
 - c. Implementasi strategi *multi-sourcing* dan menjalankan program *onboarding* untuk *new recruit* dan *internal movement*.
 - d. Menjabarkan *dual career path* (jalur karir spesialis dan generalis) untuk posisi kritikal.
 - e. Meningkatkan budaya pembelajaran *self-learning* dengan metode Pembelajaran 70-20-10.
 - f. Menyelaraskan sistem remunerasi dan program insentif untuk menarik, mempertahankan, dan memotivasi pegawai.

- g. Mengaktifkan dan implementasi program 4 (empat) Pilar *Employee Value Proposition* (EVP).
- h. Mengimplementasikan HCIS yang terintegrasi untuk mendukung *operational excellence*, pengambilan keputusan berbasis data, serta menyediakan *seamless employee experience*, melalui:
 - Digitalisasi rekrutmen, dan *onboarding*.
 - *Recruitment and onboarding people analytic*.
 - Integrasi *Performance Management System* (PMS), *Learning Management System* (LMS), dan *Succession Individual Development Plan* (IDP).
 - Integrasi *talent management system and people analytics*.
2. *Scale Up and Deep Dive*
Pada fase ini dilakukan penguatan seluruh inisiatif yang telah berjalan di tahun 2022 - 2024, yaitu diantaranya:
 - a. Menyelaraskan sistem remunerasi dan program insentif untuk menarik, mempertahankan, dan memotivasi pegawai, diantaranya melalui:
 - Transisi gaji pokok dan tunjangan jabatan.
 - Pengembangan lanjutan untuk komponen *variabel pay* pada rumpun bisnis.
 - b. Mengimplementasikan HCIS yang terintegrasi untuk pengambilan keputusan berbasis data, serta menyediakan *seamless employee experience*.
 - Digitalisasi perencanaan tenaga kerja melalui *integrated man power planning* pada *HC Information System* (HCIS).
 - *Man power planning people analytic*.
 - *Scale up* kapabilitas *people analytics* agar dapat memberikan fungsi *predictive*.

Infrastruktur Teknologi Informasi (TI)

Untuk mendukung *corporate plan*, aspirasi bisnis serta visi Perseroan sebagai “Menjadi *the Best Mortgage Bank in Southeast Asia* pada tahun 2025”, Perseroan telah menyusun enam tema pada Rencana Strategis Teknologi Informasi (RSTI) tahun 2021-2025. Dalam mengimplementasikan Rencana Strategis Teknologi Informasi (RSTI) 2021-2025, Perseroan mengusung tiga tema utama tahunan sebagai berikut:

1. **Tahun 2022: *Start to Scale***
Tahun 2022 dimulai dengan persiapan untuk perubahan skala besar di Perseroan. Inisiatif terkait implementasi *multi speed* Teknologi Informasi (TI) *operating model* berbasis *agile*. Kajian terhadap sistem-sistem kritikal yang akan di *upgrade/replace*. Pada fase ini, inisiatif yang dilakukan juga berfokus kepada peningkatan maturitas Teknologi Informasi (TI).
2. **Tahun 2023: *Expand the Transformation***
Melanjutkan eksekusi *upgrade/replace* dan atau *enhancement* terhadap sistem-sistem kritikal yang telah diidentifikasi. Melanjutkan pengembangan sistem (seperti *digital channel*) *agile based*.
3. **Tahun 2024-2025: *Continuous Improvement***
Berfokus kepada peningkatan/*enhancement* terhadap sistem-sistem non kritikal, perbaikan proses untuk meningkatkan maturitas Teknologi Informasi (TI).

Good Corporate Governance (GCG), Risk Management dan Compliance

Peningkatan Good Corporate Governance (GCG)

Perseroan menyadari dan memahami pentingnya implementasi GCG sebagai salah satu langkah strategis yang harus dilakukan untuk mencapai visi yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu, penguatan struktur organisasi dan proses bisnis yang berlandaskan prinsip-prinsip GCG secara konsisten terus dilakukan melalui penguatan empat pilar utama implementasi GCG yaitu: (i) *Commitment on Governance*; (ii) *Governance Structure*; (iii) *Governance Process*, dan (iv) *Governance Outcome*. Penguatan pilar pertama dilakukan dengan penguatan struktur dan infrastruktur tata kelola, internalisasi prinsip-prinsip GCG pada kegiatan bisnis dan operasional bank, agar manajemen perbankan sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan *Good Corporate Governance* untuk meningkatkan *shareholder value*. Penguatan pilar kedua dan ketiga dilakukan dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG pada perubahan struktur organisasi dan proses bisnis secara menyeluruh yang saat ini sedang dilakukan sebagai tahapan transformasi bisnis bank. Secara garis besar, perubahan tersebut, dilakukan dengan menyelaraskan proses pemisahan antara peran *sales*, operasional dan kebijakan risiko. Penguatan pilar tersebut dilakukan dengan mempertegas mekanisme supervisi operasional kantor, baik dari tingkatan direktorat sampai dengan unit kerja.

Selanjutnya, penguatan pilar keempat dilakukan melalui hasil penerapan prinsip GCG dalam proses bisnis bank yang dituangkan dalam laporan dan penilaian GCG serta penghargaan-penghargaan yang diterima bank, termasuk *governance outcome* yang mencakup aspek kualitatif dan aspek kuantitatif antara lain kecukupan transparansi laporan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kinerja bank seperti rentabilitas, efisiensi, dan permodalan, peningkatan/penurunan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan penyelesaian permasalahan yang dihadapi bank seperti *fraud*, pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), pelanggaran ketentuan terkait laporan Bank kepada regulator. Dalam rangka meningkatkan penerapan GCG sehingga pengelolaan perusahaan dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan, dibutuhkan suatu perencanaan strategis termuat dalam *Roadmap* GCG yang menjadi pedoman bagi seluruh BTNers dalam berkontribusi agar terciptanya pengelolaan GCG yang terarah.

Peningkatan Risk Management

Dalam rangka mendukung rencana jangka panjang Perseroan, yaitu menjadi *The Best Mortgage Bank in South East Asia* pada tahun 2025, perlu untuk tetap menjadi Bank dengan *sustainable profitability* dan melanjutkan langkah strategi serta inisiatif terkait *Risk Management* antara lain:

1. Mengembangkan *Retail Transaction Banking* Dengan Membangun *Operational Risk Acceptance Readiness and Fraud Risk Strategy*

- Memperkuat Kebijakan dan Proses
Bank akan memiliki *framework and operating model* terkait tata kelola *fraud* yang komprehensif dengan mengakomodir seluruh *channel* dan *product*.
- Pengembangan Organisasi dan Kapabilitas *Human Capital*
Pengembangan struktur organisasi khusus untuk anti-*fraud* pada unit kerja (*1st line of defense*) agar lebih efektif dan efisien.
- Pengembangan Teknologi
Update technology untuk *fraud detection* yang lebih *dynamic* dengan menggunakan AI dan *machine learning*.

2. Memperbaiki *Risk Assessment* Untuk Segmen Khusus *Non-Fixed Income* Melalui Pengembangan *Analytic Model Non-Fixed Income* dan Pengembangan Kompetensi *Credit Analyst*

3. Menyusun *Risk Criteria* Untuk *Targeted Segmen* dan *Overlay Model* Untuk Meningkatkan *Approval Rate*

- Penentuan prioritas target segmen (*existing debitur*, *funding customer*, dan *new to bank*) untuk mengelola risiko dalam fase implementasi.
- Membangun *proxy income model* untuk memproyeksikan kenaikan *income* debitur dan calon debitur dalam penentuan limit kredit dan standarisasi rekomendasi dan putusan.
- Mempertajam Kebijakan Kredit sesuai *risk-based segmentation*.

4. Pembentukan *SME Processing Center* sebagai *Platform* Pendukung Pertumbuhan Kredit UMKM

Implementasi *new business process* SME dan *decision engine* melalui digitalisasi proses yang akan dilakukan dalam mendukung perbaikan proses SME.

5. Pengembangan Kapabilitas Risiko *Digital*, Teknologi Informasi (TI) dan *Cyber* Dilakukan Melalui Pengembangan Struktur Organisasi Teknologi Informasi (TI) *Risk* dan Inisiatif Dalam Membangun *Fraud Risk Management*

Seiring dengan meningkatnya penggunaan teknologi, risiko dalam penggunaan teknologi juga meningkat sehingga dibutuhkan pengelolaan risiko teknologi, *digital* dan *cyber security* yang kokoh. Atas dasar hal tersebut, maka Perseroan mengembangkan Departemen Teknologi Informasi (TI), *Digital* dan *Cyber Risk Management* di bawah Divisi *Enterprise Risk Management* yang berfokus dalam mengelola seluruh risiko Teknologi Informasi (TI) Perseroan melalui 6 (enam) domain utama yaitu *cyber security risk*, *data privacy risk*, *project delivery risk*, *third party risk*, *continuity and resiliency risk* dan *regulatory compliance risk*.

6. Proses Bisnis Kredit Yang Lebih Baik Dengan Sentralisasi Operasi Kredit (CBC, SME, dan Konsumer), Meningkatkan *Check and Balance* dan Memperkuat Kerangka Risiko Melalui Pedoman Risiko Yang Tepat

- Dalam rangka memperbaiki proses keputusan dan kualitas dari kredit konsumer, mempercepat proses *approval* kredit konsumer melalui proses analisis data dengan menggunakan model, bank mengembangkan *Credit Scoring Model* (CSM). Selain itu, bank telah menerapkan *collection scoring*, guna mendukung *collection team* dalam menentukan skala prioritas penagihan kepada debitur berdasarkan tingkat risikonya (*high*, *medium*, *low risk*) untuk membayar kewajibannya

sehingga proses pembinaan kredit menjadi lebih efektif dan efisien.

- Dalam rangka memperbaiki proses *underwriting* dan kualitas kredit kredit komersial, mendukung implementasi *Business Process Improvement* (BPI) yang baru dan *Commercial Banking Center* (CBC), bank telah mengimplementasikan *internal credit rating* (ICR). Sejalan dengan salah satu *strategic themes bank* dalam aspirasi 2025, yaitu memperkuat SME BPI dengan memperbaiki *Turn Around Time* (TAT) melalui *workflow* kredit yang diotomatisasi, bank akan mengembangkan SME *application scoring*, yang diharapkan akan mempercepat proses persetujuan kredit UMKM melalui proses data dengan menggunakan model dan dapat mengklasifikasikan calon debitur UMKM berdasarkan tingkat risikonya. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan *market share* segmen UMKM dan memperbaiki kualitas kredit UMKM.
- Pengembangan aplikasi *operation risk tools* untuk meningkatkan kemudahan, integrasi, visibilitas dan sistem informasi yang terkini dalam pengelolaan risiko operasional, Perseroan telah mengembangkan aplikasi risiko operasional yang berisi *Loss Event Database* (BTNLED), *Risk and Control Self-Assessment* (RCSA) dan *Key Risk Indicator* (KRI).

7. Mempertahankan NPL Yang Rendah di Semua Segmen Melalui Pemantauan Risiko Yang Kuat

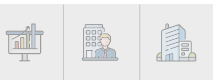
Pengembangan *Commercial Loan Early Warning System* (EWS) untuk mendukung penguatan pemantauan risiko kredit komersial melalui standarisasi, *digitization* dan pengembangan pedoman-pedoman dan perangkat-perangkat (*tools*), bank akan mengembangkan EWS dengan menetapkan parameter-parameter risiko yang mengindikasikan adanya pemburukan kualitas dari debitur kredit komersial secara individual. Hal ini diharapkan dapat membantu satuan kerja yang memberikan kredit komersial untuk mengidentifikasi tindakan-tindakan yang harus segera dilakukan guna mencegah kredit komersial dari debitur tersebut menjadi kredit komersial yang bermasalah.

Bidang Pengembangan Jaringan (*Delivery Channel*)

Optimalisasi *delivery channel* dalam mendukung bisnis dilakukan melalui pengembangan kuantitas dan ragam *channel* dengan strategi perluasan jaringan yang difokuskan pada empat inisiatif utama, yaitu strategi regionalisasi, ekspansi cabang, *agent banking* dan *digital channel*. Strategi regionalisasi merupakan bentuk pengelompokan wilayah kerja yang tidak hanya berdasarkan lokasi, namun juga berdasarkan densitas cabang eksisting guna memastikan penyelarasan strategi yang lebih baik. Adapun pertimbangan-pertimbangan yang digunakan pada strategi regionalisasi adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan Wilayah Yang Terlalu Padat Akan Memastikan Kontrol Terhadap *Key Performance Indicator* (KPI) dan Penyelarasan Strategi Yang Lebih Komprehensif

Penentuan zona operasional cabang tidak hanya mempertimbangkan lokasi, namun juga rasio kepadatan cabang.



2. Optimalisasi Produktivitas Kantor Cabang

Pada jangka pendek, Perseroan tidak terlalu ekspansif dalam pembukaan kantor cabang. Tahun ini Perseroan akan berusaha untuk meningkatkan pengawasan kantor cabang. Terhadap *outlet* di bawahnya dan akan melakukan penilaian atau evaluasi terhadap kinerja *outlet* yang tidak produktif untuk dilakukan penutupan. Hal ini dilakukan agar kantor cabang dapat melakukan pengawasan kinerja setiap *outlet* di bawahnya secara lebih baik, sehingga akan mendukung kinerja korporat.

3. Agent Banking

Mengoptimalkan *agent banking* sebagai agregator dengan memperluas aliansi strategis, misalnya kantor pos dan *minimart* sebagai agen penjual.

4. Digital Channel

Pengembangan *digital channel* ditujukan untuk *remote access* guna menargetkan segmen *emerging affluent*, generasi muda dan meningkatkan kenyamanan transaksi bagi nasabah. Pengembangan *channel digital* difokuskan pada:

- Target segmen yang menarik dan terdefinisi secara jelas, dengan fokus pada pemilihan segmen, direntang usia 20 sampai dengan 35 tahun.
- Penawaran yang tepat sasaran (*right-to-target*) dengan memanfaatkan *big data analytical advantage* untuk memperoleh rekomendasi produk atau layanan bagi tiap nasabah.
- Customer value management*, melalui penawaran produk dan layanan yang luas serta universal, tapi lebih fokus pada kebutuhan utama nasabah (*customer centric*).

Strategi Jangka Panjang

Untuk meningkatkan kontribusinya pada sektor perumahan dan mendukung *roadmap* transformasi Kementerian BUMN, Perseroan menetapkan visi menjadi *The Best Mortgage Bank in South East Asia* pada tahun 2025, dengan aspirasi pada tahun 2025 sebagai berikut:

1. Menggandakan Low Cost Funding

Transformasi kapabilitas *channel* sehingga menjadi bank transaksional untuk mendukung peningkatan *low cost funding* dan pertumbuhan *fee based income*.

2. Mendorong Keterjangkauan Akses Perumahan Bagi Masyarakat Indonesia

Menghadirkan produk perbankan untuk meningkatkan taraf hidup, pembiayaan rumah subsidi untuk segmen *mass* dan membangun *channel direct-to-customers* baru bagi segmen *mass affluent*.

3. Membangun One Stop Shop Financial Solution Untuk Konsumen dan Bisnis Terkait Perumahan

Memberikan solusi pinjaman dan investasi untuk mengembangkan bisnis berbasis ekosistem perumahan yang akan mendorong kontribusi sektor perumahan.

4. Menjadi Inovator Digital dan Home of Indonesia's Best Talent

Melakukan proses digitalisasi untuk membangun operasi yang paling efisien dan mengembangkan talent terbaik.

5. Membangun Portofolio Berkualitas Tinggi dan Mempertahankan Tingkat NPL Yang Rendah

Memanfaatkan teknologi untuk mengembangkan proses manajemen risiko yang terintegrasi dan kokoh untuk menurunkan NPL sejalan dengan *market sustainability*.

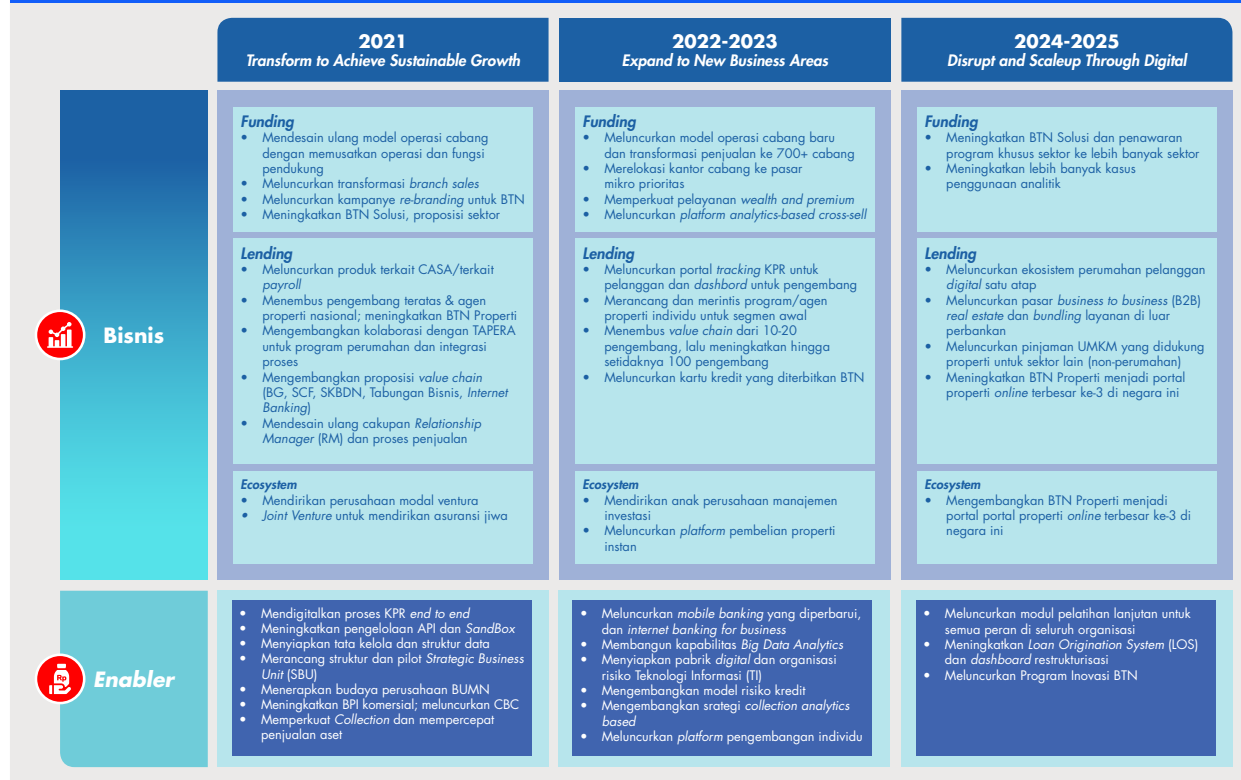
Untuk mencapai aspirasi tersebut, telah ditetapkan 10 (sepuluh) tema strategis *Corporate Plan* Tahun 2021-2025 sebagai berikut:

- Penyempurnaan model operasional cabang untuk meningkatkan DPK *low-cost* dan bisnis ritel dengan mengoptimalkan *footprint* jaringan dan membangun *customer ownership secara end to end* (segmen Komersial, SME dan Konsumer) termasuk *funding, lending, fee* dan layanan lainnya.
- Kemitraan/pertumbuhan anorganik untuk mendukung bisnis utama di sektor perumahan, menangkap peluang di bidang *multifinance*, asuransi dan manajemen aset.
- Pengembangan pembiayaan perumahan untuk segmen *emerging affluent* dan *affluent*, dengan meningkatkan proposisi *direct-to consumer*, serta bekerja sama dengan *developer* terkemuka dan jaringan agen *real estate*.
- Pengembangan program kepemilikan rumah KPR bersubsidi guna mendukung agenda nasional untuk perumahan terjangkau.
- Memperluas *value chain* dalam *real estate* yang menyasar UKM *supplier* dan kontraktor dengan menyediakan *supply chain financing, bank guarantee*, SKBDN dan solusi tabungan bisnis
- Mengembangkan solusi keuangan yang lengkap (pinjaman, tabungan, transaksi, dan investasi) menyasar nasabah berpendapatan tetap, khususnya bagi *emerging affluent* dan SME, serta menyiapkan strategi *cross-selling* dan *upselling*
- Mengembangkan *channel* transaksi elektronik, otomatis berbagai proses bisnis dan mengembangkan kerja sama dengan ekosistem *digital*, termasuk pengaturan infrastruktur Teknologi Informasi (TI) pendukung dan model operasional.
- Penerapan struktur SBU, yang sesuai untuk menciptakan organisasi berorientasi pada kinerja, membangun kapabilitas *hard and soft skill*, serta peluncuran *culture* program untuk *sales* dan *service*, tata kelola dan manajemen risiko, kinerja, dan pembelajaran.
- Proses bisnis kredit yang lebih baik dengan sentralisasi operasi kredit (CBC, SME dan Konsumer), meningkatkan *check and balances*, dan memperkuat kerangka risiko melalui pedoman risiko yang tepat.
- Mempertahankan tingkat NPL yang rendah di semua segmen melalui pemantauan risiko yang kuat, standardisasi pengerjaan, proses penagihan yang memanfaatkan solusi *digital*, serta strategi penjualan aset.

Adapun *transformation journey* dari 10 (sepuluh) tema strategis tersebut sampai dengan tahun 2025 di atas adalah sebagai berikut:

- Tahun 2021, "*Transform to Achieve Sustainable Growth*".
- Tahun 2022, "*Expand to New Business Areas*".
- Tahun 2023, "*Disrupsi Digital Untuk Menguasai Ekosistem Perumahan*".
- Tahun 2024, "*Memperluas Area Bisnis dan Menyediakan Solusi Keuangan Terintegrasi*".
- Tahun 2025, "*One Stop Financial Solution Dalam Ekosistem Perumahan*".

Transformation Journey Bank BTN 2021-2025



Aspek Pemasaran

Strategi Pemasaran

Untuk membantu Perseroan dalam meningkatkan keunggulan bersaing dibutuhkan adanya strategi pemasaran sebagai pedoman dalam pemasaran produk serta memberikan arahan terkait jalannya bisnis.

Campaign Plan 2023

Campaign Plan 2023 merupakan strategi perencanaan promosi Perseroan selama tahun 2023, dengan mengoptimalkan media konvensional dan media *digital*, *Out of Home* (OOH) serta berbagai kegiatan aktivasi, yang terbagi pada kategori:

- Primary (Hero Campaign)** : BTN Mobile (Januari - Desember)
Secondary :
 - BTN Bisnis (Juni - Oktober)
 - Plus by BTN Prioritas (Juli)
 - BTN Spekta (Agustus)
 - KPR BTN Gaess (November - Desember)
 - KPR BTN Bersubsidi (November - Desember)
- Product of The Month (POM)** :
 - BTN Mobile (Januari - Desember)
 - Tabungan BTN Bisnis (Mei - Oktober)
 - KPR BTN Gaess (November - Desember)
- Festive Campaign** :
 - Promo HUT Ke-73 Bank BTN (Februari) = *moment of truth* ulang tahun ke-73 Bank BTN
 - Promo Ramadan dan Idul Fitri (Maret - April) = *moment of truth* Ramadan dan Idulfitri.
 - Promo HUT Ke-78 Republik Indonesia (Agustus) = *moment of truth* HUT Ke-78 Republik Indonesia
- Always ON** : Merupakan publikasi dan pemasaran melalui media *digital*, baik itu sebagai upaya *call to action* maupun membangun *awareness* terkait produk tersebut.



	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des
Primary	BTN mobile											
Secondary	BTN mobile BTN BISNIS Plus BTN spekta Mall Roadshow KPR BTN GAESS KPR BTN Subsidi IPEX HUT KPR 47											
POM 1	BTN mobile											
POM 2	BTN BISNIS KPR BTN GAESS											
Festive Campaign	Festive HUT Ke-73 BTN Festive Ramadan & Idulfitri Festive HUT Ke-77 RI Festive HUT Ke-47 KPR BTN											
Always On	• Produk dan Promo EChannel BTN (BTN Mobile, IB dan ATM) • Produk dan Promo Kartu Debit BTN Visa dan GPN. • Tabungan BTN Batara dan BTN Siap! • Tabungan BTN Bisnis • KPR dan BTN Properti • BTN Spekta • Layanan dan Program BTN Prioritas • Produk dan Program KPR Non Subsidi, KPR Subsidi, KAR dan KRING • Produk dan Program Syariah • Produk dan Program Lainnya • Corporate Communication • Festive • Government Communication											

Hero Campaign

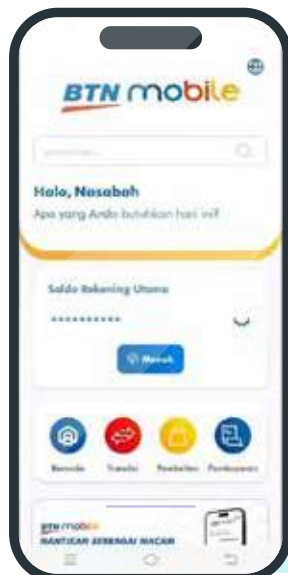
Objektif			
Meningkatkan <i>awareness</i> dengan menjaga relevansi BTN & HGCTHI dengan generasi muda, terutama Gen Z dan Milenial melalui fitur dan layanan BTN dalam memiliki rumah, investasi dan kemudahan transaksi.			
HGCTHI 2020	HGCTHI 2021	HGCTHI 2022	HGCTHI 2023
Memberi pandangan baru tentang prinsip <i>You Only Live Once</i> demi masa depan yang lebih terencana	BTN melangkah bersama kaum muda untuk merengkuh optimisme: Berani menghadapi dan menyiasati tantangan masa kini	BTN menyediakan solusi nyata (actionable) untuk progress dalam hidup dalam berbagai hal (mulai memiliki rumah, investasi dan menyiapkan dana pensiun) yang terintegrasi secara <i>digital</i> .	BTN dengan produk andalan di 2023, mendukung dan memberikan jalan pada nasabah untuk lebih berani bertindak, tidak menunda lagi dalam hal memiliki aset Karena Hidup Gak Cuma Tentang Hari ini, SEKARANG WAKTUNYA

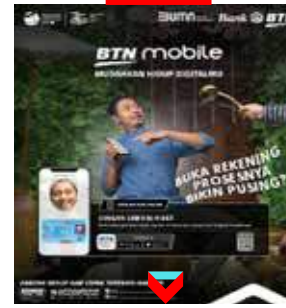


BTN MOBILE SEBAGAI HERO CAMPAIGN TAHUN 2023

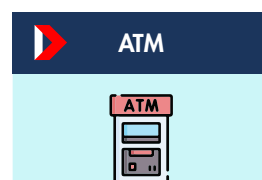
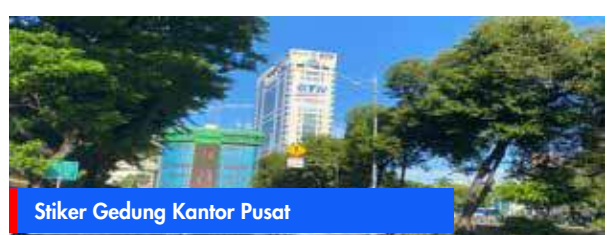
1. Pembuatan TVC fitur BTN Mobile

Fitur unggulan BTN Mobile dikemas dengan materi komunikasi yang mengangkat tema keberagaman suku dari setiap daerah, sehingga informasi yang disampaikan pada materi komunikasi lebih menarik dan *relate* dengan ragam kebutuhan finansial.



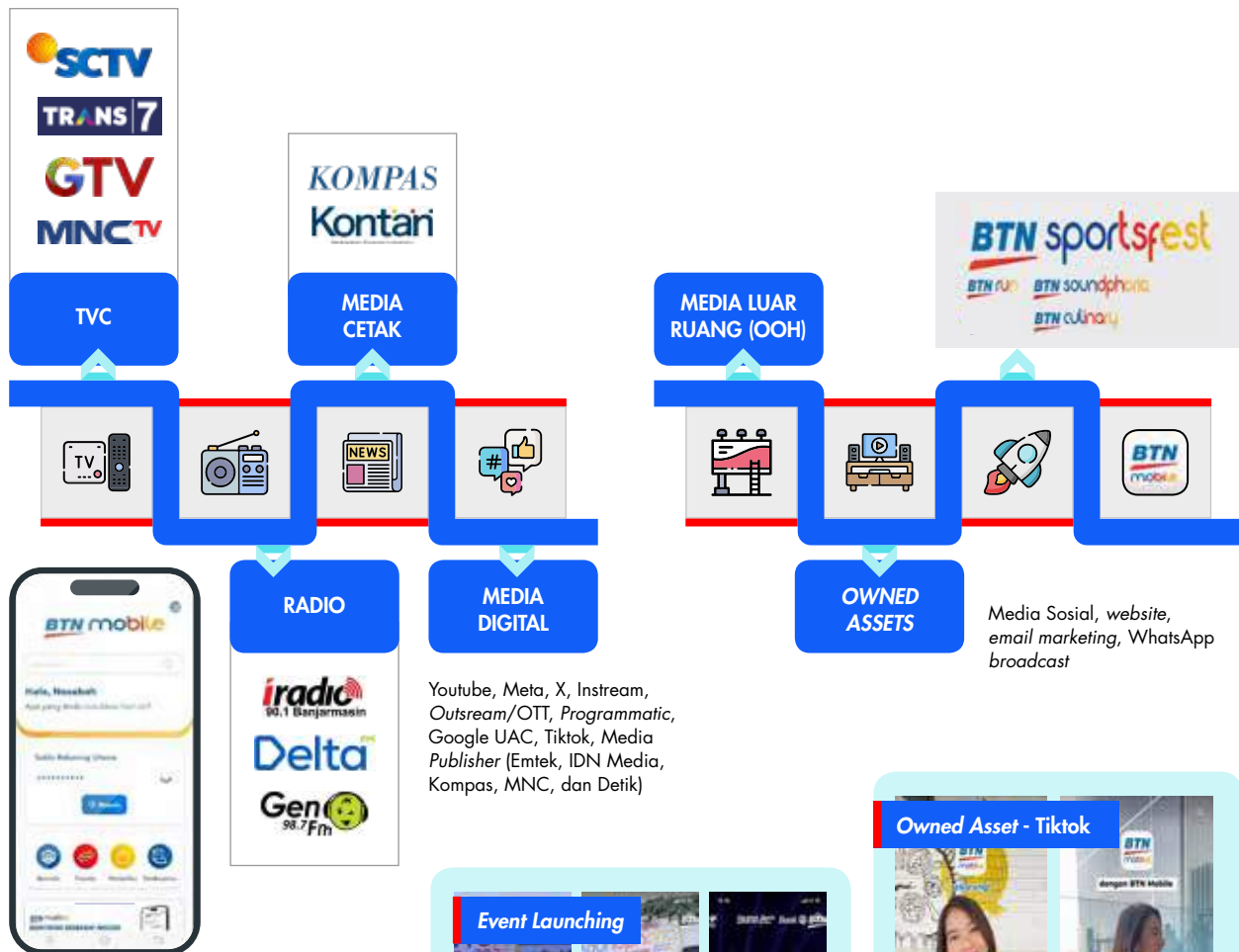
		
CARI PROPERTI & KPR / SUNDA	CASHFLOW TRACKER / MINANG	ONLINE ON BOARDING / JAWA
Kemudahan memilih hunian hingga pengajuan pembiayaan dengan KPR BTN TVC: bit.ly/tvcbtnmobilesunda	Mudah pantau transaksi dalam satu genggaman TVC: bit.ly/tvcbtnmobilepadang	Kemudahan memilih hunian hingga pengajuan pembiayaan dengan KPR BTN TVC: bit.ly/tvcbtnmobilejawa

2. Pre-launch BTN Mobile (Desember 2022 - Februari 2023)

 LED Videotron  Plaza Indonesia, Ratu Plaza, SCBD, Sarinah (outdoor dan Indoor), Wisma indomobil, prapanca, Bandara Soetta	  MEDSOS Own Asset: Instagram, Facebook, X, Youtube	 TV Squeeze frame dan Superimpose  ATM Seluruh ATM KC
 Spanduk & Umbul	 ATM	
 Stiker Gedung Kantor Pusat	 Stiker Gedung Kantor Cabang	



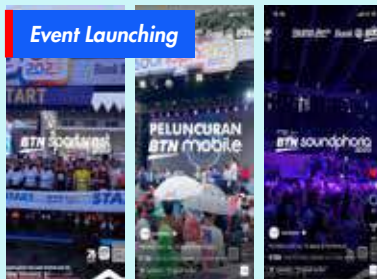
3. Launching BTN Mobile (Februari 2023)



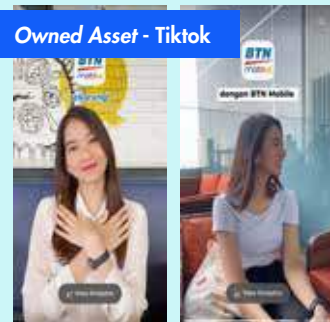
Materi Komunikasi



Event Launching

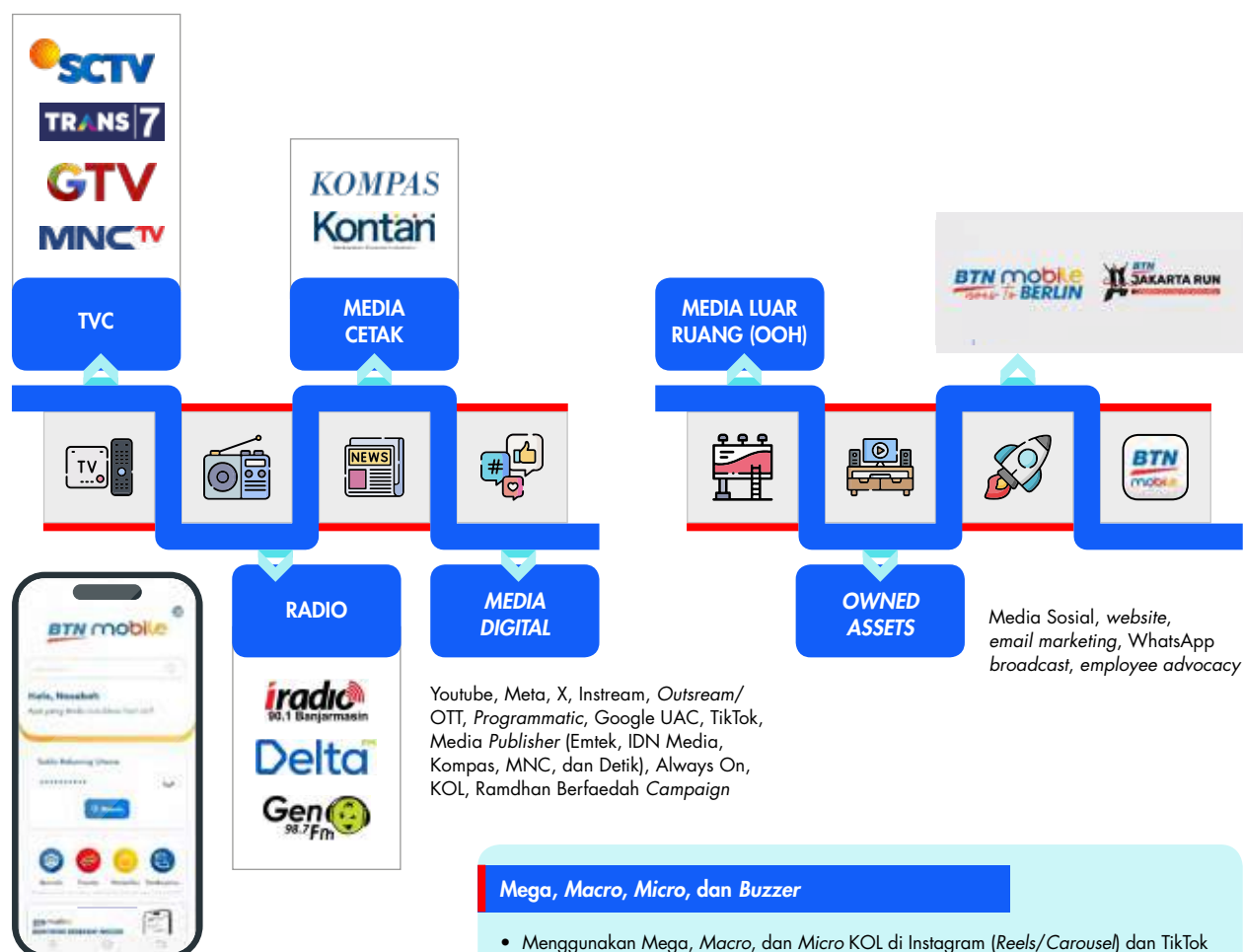


Owned Asset - Tiktok



Owned Asset

4. Post launch BTN Mobile (Maret - Desember 2023)



POST LAUNCH - KOL



ANQUOTE
Kalian tim nikah dulu baru punya rumah, atau punya rumah dulu baru nikah?



POKRAKIVE
Suka bingung udah sehat mungkin, tapi kok belum akhir bulan duit udah abis.

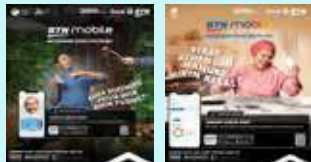
1.649.930 Views, 305.830 Likes, 3.075.153 Reach

- 4 Mega dan Macro KOL di Instagram dengan 890.781 views, 79.593 likes, 749.395 reach, dan ER 11,12%
- 4 Mega dan Macro KOL di TikTok dengan 735.000 views, 40.896 likes, dan ER 5,61%
- 4 Micro KOL di Instagram dengan 24.149 views, 3.306 likes, 223.823 reach, dan ER 1,55%
- 7 Micro KOL di Tiktok dengan 174.909 views, 12.503 likes, dan ER 2,36%
- 4 Aggregator di Instagram 169.532 likes, 2.101.935 reach, dan ER 8,55%

Materi Komunikasi



- TV, ATM, TV Banking Hall
- Paid Ads (digital)



Materi Komunikasi



OHH - BUSWAY



MOBIL OPERASIONAL KC



OHH - TAKSI



INFLIGHT ADS

POST LAUNCH - FESTIVE



Ramadan Berfaedah

- Menggunakan cerita yang *relate* dengan *audience*
- Menghadirkan *content creator* sebagai *talent* dengan dilatarbelakangi berbagai permasalahan atau keribetan yang dialami oleh banyak orang

POST LAUNCH - SUSTAIN



EMPLOYEE ADVOCACY (PARTIPOST)

- **Employee advocacy** merupakan kegiatan promosi dan *awareness* perusahaan dan/atau produk dan layanannya oleh pegawai yang bekerja di sana. **52% konsumen** lebih memercayai pegawai di suatu perusahaan daripada perusahaan atau merek itu sendiri (Forbes.com).
- Pegawai mempromosikan BTN Mobile di akun media sosial pribadi untuk **meningkatkan awareness**.

5. BTN Mobile goes to Berlin



Phase - 1 (Run Community and Competition)

BTN Run 2023	BTN Mobile Goes to Berlin "Run Community Roadshow"
12 Februari 2023	Februari - Maret 2023

Objective:

- Launching BTN Mobile apps
- Kick-off program aktivasi "BTN Mobile goes to Berlin"

Activity

BTN RUN 2023

Phase - 2 (Marathon Journey)

BTN Run 2023 Goes to Berlin "Runners Journey"	BTN Runner Trip to Berlin 2023
Mei - September 2023	21-25 September 2023

Objective:

- Edukasi mengenai fitur-fitur BTN Mobile apps
- Memperkuat image BTN sebagai bank yang modern, prestigious.

Activity

- Social media and offline activation mengenai perjalanan runner BTN dalam persiapan berlari di Berlin Marathon 2023

Runner BTN melakukan *travel* ke Berlin untuk mengikuti Berlin Marathon 2023

Event date:
24 September 2023

Travel date:
21-25 September 2023














6. BTN Jakarta Run 2023



Komunikasi 360°

Marketing Activity

Above the Line (ATL) Marketing:

- Target audience yang Luas
- Lebih menjelaskan sebuah konsep atau ide. Tidak ada interaksi langsung dengan audience



TV



Radio



Magz/
News Paper



OOH/
DOOH

Below the Line (BTL) Marketing:

- Target audience terbatas
- Media atau kegiatan memberikan audience kesempatan untuk berinteraksi bahkan action membeli



Event
Sponsorship



Point of Sale
Materials
(Poster/Leaflet)



Direct Marketing
(Mail/SMS/WA
Blast)

Through the Line (TTL) Marketing melibatkan penggunaan strategi pemasaran ATL dan BTL. Tren konsumen baru-baru ini di pasar membutuhkan integrasi strategi ATL dan BTL untuk hasil yang lebih baik. Periklanan 360° di mana kampanye dikembangkan dengan visi membangun merek serta konversi/akuntabel. Digital Marketing termasuk dalam TTL Marketing karena menggabungkan ATL dan BTL Marketing.

Disamping menerapkan strategi pemasaran tersebut di atas Perseroan juga menerapkan strategi pemasaran produk dan layanan dalam mendorong peningkatan pangsa produk dan

jasa. Selain itu, Perseroan juga meningkatkan efektivitas kerja sama dalam pemasaran dan pengembangan produk baru.

Strategi Pemasaran Kredit Korporasi

Pemasaran produk Kredit Segmen Korporasi sepanjang tahun 2023 mengacu pada *portfolio guideline* yang telah ditetapkan dengan strategi antara lain:

1. Peningkatan *Portfolio* di sektor eksisting yang berfokus di sektor:
 - a. Perumahan
 - b. Konstruksi
 - c. Telekomunikasi
 - d. Infrastruktur Energi
 - e. Lembaga Negara
2. Perluasan *Portfolio* Kredit Korporasi di Sektor Baru antara lain:
 - a. Energi Terbarukan
 - b. Agro Industri terpilih
 - c. Infrastruktur lainnya yang mendukung perumahan
 - d. Kesehatan
3. Perluasan kerja sama strategis dengan debitur korporasi potensial beserta *value chain*nya.
4. Implementasi *Single Relationship Model* guna menjaga penempatan dana Debitur Segmen Korporasi di Bank, meningkatkan transaksi bisnis turunan dari debitur berikut mitra bisnisnya.

Strategi Pemasaran Kredit Komersial

Perseroan melakukan beberapa strategi pemasaran untuk produk kredit komersial selama tahun 2023 yakni sebagai berikut:

1. Melakukan Ekspansi Kredit Komersial Yang Fokus Pada Pertumbuhan Posisi Kredit

- a. *Bundling* produk dengan produk KPR Subsidi dan KPR Non Subsidi.
- b. Penentuan target berdasarkan potensi pada masing-masing wilayah *Commercial Banking Center* (CBC) termasuk sektor ekonominya.
- c. Perluasan segmentasi kredit komersial menasar pada kredit jangka panjang.
- d. Melanjutkan yang telah menjadi program sebelumnya antara lain sektor rumah sakit dan pendidikan.
- e. Program sinergi Perseroan dengan asosiasi pengembang.

2. Tata Kelola Kredit Komersial Yang Lebih Baik Dengan Tujuan Peningkatan Layanan Kepada Nasabah

- a. Pengembangan dan sosialisasi produk kredit komersial sesuai dengan perkembangan bisnis.
- b. Optimalisasi penggunaan aplikasi kredit komersial dan dukungan Teknologi Informasi (TI).

Strategi Pemasaran Kredit Perumahan

Inisiatif untuk mengembangkan bisnis kredit pada jangka pendek dan menengah yaitu:

1. Mengembangkan Pangsa Pasar KPR di Segmen *Emerging Affluent* dan *Affluent*

- a. Membentuk *sales center* yang fokus pada penjualan KPR kepada segmen *emerging affluent* dimana pada tahun 2023 telah dilakukan pembukaan *sales center*

di Jakarta-Kelapa Gading Square, Tangerang-BSD dan Surabaya.

- b. Program kerja sama dan *marketing* dengan agen properti nasional dan lokal, sebagai strategi *Direct to Customer* (D2C).
 - c. Mengembangkan kerja sama dengan *developer* untuk mengembangkan proyek perumahan di segmen *emerging affluent*.
 - d. Memperkuat aplikasi dan portal BTN Properti dengan digitalisasi proses KPR secara *end to end*, baik untuk konsumen dan pengembang.
 - e. Membangun *platform instant purchase* sebagai bagian BTN Properti.
 - f. Mengembangkan skema KPR *Rent to Own* sebagai skema KPR yang *affordable* dan *equitable*, yang menasar generasi milenial.
- ### 2. Peningkatan Kredit *High Yield Margin*
- a. Meningkatkan kredit *high yield* (KRING, KAR) *beyond mortgage* melalui program *up-selling* dan *cross selling* kepada nasabah *captive*, kawasan perkantoran dan industri.
 - b. Program *upselling* dan *cross selling* produk non subsidi kepada nasabah KPR Subsidi yang sudah atau hampir lunas melalui kapabilitas *analytics* dan program *upselling*.
 - c. *Pre approved* pinjaman atau kredit kepada debitur eksisting yang memenuhi kriteria melalui *Eagle Project* dan *Ultimate Project* (KAR dan KRING)

Strategi Pemasaran Kredit Perumahan Subsidi

Strategi pemasaran kredit perumahan subsidi adalah sebagai berikut:

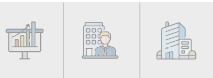
1. Memperluas hubungan dengan Lembaga Pendukung KPR Bersubsidi (Kementerian PUPR, BP TAPERA, Kementerian Keuangan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), Bappenas, dan lainnya)
2. Optimalisasi dan *monitoring* program sektor informal yang sudah berjalan seperti Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI), Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), dan Gojek.
3. Mendapatkan dukungan dari BP Tapera, dan SMF, sebagai sumber dana tambahan KPR Bersubsidi.
4. Mengembangkan skema pembiayaan yang *equitable* dan inklusif.
5. Meningkatkan *market share* KPR Bersubsidi dengan mengoptimalkan percepatan proses berkas.

Strategi Pemasaran Pendanaan Komersial

Strategi pemasaran untuk pendanaan komersial dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. *Business Ecosystem*

Memperdalam kegiatan akuisisi seluruh potensi bisnis nasabah institusi baik untuk meningkatkan *volume funding*, *feebased*, dan *lending*. Fokus utama dalam strategi



business ecosystem yaitu *property related*, *education*, *healthcare*, perdagangan dan kawasan industri.

2. Reward Program

Dalam rangka mengapresiasi dan meningkatkan hubungan kerjasama dengan nasabah, maka disediakan *reward program* khusus untuk nasabah yaitu *Supportive Program and Customer Engagement Xtra Rewards* (SPACE-X). SPACE-X adalah program yang bertujuan untuk menstimulus akuisisi giro baru dan mengoptimalkan nasabah eksisting, dengan memberikan benefit lebih atas aktivasi CMS dan pemberian *referral*.

3. Diversifikasi Nasabah

Akuisisi nasabah dengan kategori (*cash rich* dan *middle*) dengan fokus untuk semua segmen baik BUMN Grup, *Private Corporation*, *Education*, dan *Government* diseluruh Regional.

4. Enhance Struktur Organisasi

Untuk memperkuat akuisisi nasabah *middle institution* maka dibentuk struktur organisasi baru yang khusus untuk melakukan penanganan atas akuisisi-akuisisi dana lembaga *medium*.

Strategi Pemasaran Ritel Funding

Strategi Pemasaran tahun 2023 untuk produk DPK Ritel diuraikan sebagai berikut:

1. Ekosistem Bisnis

Mengembangkan ekosistem bisnis sebagai transformasi bisnis yang berkelanjutan dengan segmen *property related*, *healthcare*, perdagangan, *education* dan kawasan industri.

2. Participating Account

Meningkatkan *participating account* dengan program *first usage*, *activation*, dan *strategic partnership*.

3. Financial Solution

Program BTN Solusi menawarkan financial solution bagi pegawai yang bersumber dari pengelolaan *payroll*/tunjangan. Akuisisi *payroll* dengan fokus utama sektor BUMN dan entitas anak, *education* and *health* serta pensiunan.

4. Branchless Banking

Bisnis keagenan akan perfokus pada peningkatan *awareness* dan kualitas agen melalui jumlah transaksi dan dan *funding*.

Strategi Pemasaran SME Banking

Strategi pemasaran tahun 2023 untuk produk SME Banking diuraikan sebagai berikut:

1. Peningkatan Penyaluran High Yield Loan (Eagle Project)

- Pembentukan Mitra Unit UMKM pada Kantor Cabang Pembantu (KCP) untuk Penyaluran Pembentukan Mitra Unit UMKM pada Kantor Cabang Pembantu (KCP) untuk penyaluran Kredit UMKM.
- Peningkatan realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui *direct selling* KUR pada debitur KPR dan kredit konsumen lainnya.

- Segmenting* penjualan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit KUMK kepada ekosistem atau komunitas sesuai potensi wilayah melalui BPI SME.

2. Mengembangkan Sistem UMKM Digital

Pengembangan digitalisasi proses pemberian kredit UMKM menggunakan *mobile app* dan *web app*.

3. Perbaikan Proses Bisnis dan Kualitas SDM

- Pengembangan *Business Process Improvement* (BPI) produk kredit UMKM.
- Pendidikan SME dan *Credit Program Sales* dengan metode *in house training* dan *e-learning*.
- Peningkatan performance Kredit SME melalui Program SME of The Year, Program Reward SME dan SME Gathering.
- Efektivitas strategi dan program kerja melalui *coaching* SCPU Head, SME dan *Credit Program Sales*.
- Optimalisasi Tenaga Ahli Daya (TAD) SME di Kantor Cabang Pembantu (KCP).

Strategi Pemasaran Produk Syariah

Strategi pemasaran produk syariah meliputi produk pendanaan syariah dan pembiayaan syariah yang diuraikan sebagai berikut:

1. Strategi Pemasaran Produk Pendanaan Syariah

- Peningkatan kerja sama dengan lembaga pendidikan, lembaga Islam, pengembang, kementerian/lembaga pemerintah, dan komunitas muslim untuk pemenuhan kebutuhan pengelolaan dana lembaga serta layanan transaksional dan investasi.
- Meningkatkan kerjasama dengan lembaga/institusi dalam layanan *payroll*.
- Penguatan kerjasama kelembagaan dengan program kolaborasi dan insentif nasabah.
- Peningkatan kerjasama dengan lembaga pendidikan untuk penyaluran Kartu Indonesia Pintar dan Tabungan untuk pelajar.
- Meningkatkan DPK Giro Non FLPP dari kerjasama pengelolaan kas Pemerintah (Kementerian/Lembaga/Badan Layanan Umum)
- Peningkatan kerja sama pembayaran dan optimalisasi dana zakat, infaq, sedekah, dan wakaf secara *digital* dengan lembaga filantropi.
- Intensifikasi tabungan pada nasabah pembiayaan eksisting dan komunitas.
- Bekerja sama dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dalam memberikan layanan Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) guna peningkatan tabungan haji dan umrah.
- Meningkatkan peranan Kantor Layanan Syariah (KLS) dalam layanan pendaftaran haji serta penjualan produk Tabungan Haji dan Umroh.
- Peningkatan dana *Current Account and Savings Account* (CASA) melalui aktivitas pemasaran antara lain *investor gathering*, *property expo*, dan *individual engagement*.

- k. Meningkatkan *brand awareness* Perseroan Unit Usaha Syariah (UUS) melalui program-program *marketing communications*.
- l. Layanan perbankan *digital* melalui pembukaan rekening nasabah secara *online* tanpa nasabah perlu datang ke *outlet*.
- m. Pengembangan fitur *e-channel* (*mobile banking*, *internet banking*, dan ATM).

2. Strategi Pemasaran Produk Pembiayaan Syariah

- a. Mengembangkan kerja sama dengan *top developer* untuk mendapatkan *ticket size* yang lebih tinggi (antara lain *emerging affluent* dan *affluent*) dengan peningkatan upaya pemasaran.
- b. Memperkuat komunikasi dengan *stakeholder* perumahan (Kementerian PUPR dan Kementerian Keuangan) dalam penyusunan Program Sejuta Rumah Pemerintah.
- c. Program kerja sama dan *marketing* dengan agen properti nasional dan individu, sebagai strategi *Direct to Consumer* (D2C), khususnya untuk KPR rumah *second*.
- d. Mengembangkan bisnis pembiayaan dengan sasaran segmen *millennial* melalui program *partnership* dengan pengembang dalam *joint promo* untuk segmen *millennial* serta KPR Harapan.
- e. Optimalisasi *database* nasabah KPR eksisting melalui program *top up* pembiayaan.
- f. Mengembangkan dan menjual produk pada sepanjang *value chain* mitra *developer* komersial.
- g. *Maintenance* secara berkelanjutan *developer* eksisting proyek baru atau pengembangan proyek eksisting.
- h. Melakukan diversifikasi portofolio pembiayaan kepada BUMN, grup usaha swasta, dan institusi pendidikan.
- i. Digitalisasi dan automasi proses pembiayaan konsumen dan komersial (peningkatan *Financing Origination System/FOS* Konsumer dan Penggunaan *FOS* Komersial).
- j. Mengembangkan produk KPR khusus *millennial* untuk meningkatkan akuisisi pasar *millennial*.
- k. Menyusun *marketing communication* dan *rebranding* yang efektif dan terintegrasi melalui *umbrella campaign*.
- l. Promo *merchant* dan *partnership* yang dapat menjangkau seluruh Indonesia.
- m. Pengadaan event yang secara langsung berdampak pada pencapaian bisnis melalui aktivitas terpadu (*gathering* nasabah) dan *branch activation*.
- n. Membuat produk yang bisa mengakomodir skema *Rent to Own* Syariah.
- o. Sinergi dan optimalisasi kerjasama antara mitra pengembang dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS TK) dalam penyaluran KPR Manfaat Layanan Tambahan (MLT) BPJS TK.
- p. Perluasan kerjasama dengan mitra penyedia barang dan jasa dengan sistem *bundling* KPR.
- q. Perluasan kerjasama dengan mitra penyedia *travel*.

Strategi Pemasaran Layanan BTN Prioritas

Layanan BTN Prioritas merupakan layanan istimewa yang diperuntukan khusus bagi nasabah BTN Prioritas. Karena target pasar yang spesifik, sehingga aktivitas pemasaran lebih banyak bersifat *Bellow The Line* (BTL), melalui *direct communication* ke nasabah. Dimulai sejak pertama kali nasabah bergabung BTN Prioritas, nasabah akan menerima *welcome greeting*. Nasabah juga akan mendapatkan *update* tentang promo BTN Prioritas serta program-program berjalan yang menarik melalui *sms blast* yang dikirim secara taktikal ataupun secara regular melalui *Priority Booklet*.

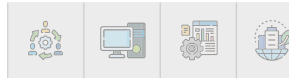
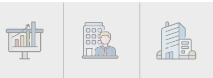
Meskipun begitu, strategi pemasaran yang bersifat *Above The Line* (ATL) tetap dilakukan, karena BTN Prioritas tetap membutuhkan *exposure* untuk lebih dikenal secara *brand*, mengingat *Top of Mind* Perseroan masih terkait dengan KPR. Aktivitas yang dilakukan diantaranya iklan di TVC, iklan di bioskop, dan event-event di *public places*, dan eksibisi kerjasama dengan *partner*.

Selain strategi pemasaran yang bersifat BTL maupun ATL, pemasaran BTN Prioritas memanfaatkan PLUS by BTN Prioritas sebagai *engine marketing* untuk meningkatkan *loyalty* nasabah BTN Prioritas. Saat ini sudah dikembangkan PLUS Acquisition sebagai *tools marketing* untuk alternatif bagi *sales team* dalam menawarkan program-program dengan berbagai macam *benefit* dan/atau hadiah menarik bagi nasabah BTN Prioritas, yang sebelumnya penawaran dilakukan secara langsung oleh *Relationship Manager* BTN Prioritas. PLUS Acquisition dalam strategi pemasaran merupakan *pull factor* yang berfungsi untuk menciptakan kebutuhan bagi nasabah BTN Prioritas.

Strategi Pemasaran Produk Transaction Banking

Uraian strategi pemasaran untuk produk *transaction banking* sepanjang tahun 2023 antara lain adalah sebagai berikut:

1. Melakukan *piloting* 3 (tiga) Segmen Ekosistem Bisnis yang merupakan program inisiasi pada tahun 2023 untuk mendukung pemberian layanan "*One Stop Service*", antara lain pada Industri Semen, Kesehatan, dan Pendidikan.
2. Meningkatkan kolaborasi akuisisi nasabah baru dengan Segmen SME, Komersial, maupun Korporasi untuk mendorong aktivitas produk dan layanan *transaction banking*, antara lain pengelolaan kas untuk mendukung peningkatan CASA dan *trade finance* untuk mendukung peningkatan *fee based income*.
3. Memperluas kerja sama dengan pihak Asuransi, Instansi Pemerintah, Perusahaan Swasta dan BUMN, serta *stakeholder* lainnya yang mendukung percepatan akuisisi produk *transaction banking*.



4. Optimalisasi peran *transaction banking sales* dan *wholesale implementor* dalam mengeksekusi bisnis *transaction banking* di wilayah.

Strategi Pemasaran Layanan Digital

Dalam meningkatkan jangkauan layanan *digital*, Perseroan menyusun beberapa langkah strategi pemasaran sebagai berikut:

1. Pengembangan Layanan Digital

Untuk meningkatkan kepuasan nasabah, perseroan senantiasa mengembangkan produk dan fitur layanan *digital* yang berorientasi pada kebutuhan perbankan nasabah. Perseroan telah mengembangkan berbagai *platform digital* mulai dari Superapps BTN Mobile, EDC *Acquiring*, QRIS, *API Management* hingga layanan yang mendukung keamanan transaksi nasabah seperti SMS Notifikasi, *login biometric*, dan lain-lain. Berbagai *platform* tersebut telah dirancang sedemikian rupa agar nasabah Perseroan dapat melakukan transaksi perbankan dimanapun dan kapanpun sesuai dengan kebutuhan, sehingga rasa *engagement* nasabah dengan Perseroan semakin kuat dan bersinergi.

2. Penguatan Digital Mortgage Ecosystem

- Perseroan sebagai bank yang fokus di bidang perumahan, memiliki peran sentral dalam membentuk ekosistem *digital mortgage*. Atas dasar tersebut maka dalam setiap pengembangan layanan selalu mengedepankan kerja sama strategis dengan mitra yang tergabung dalam ekosistem perumahan mulai dari hulu sampai dengan hilir melalui berbagai produk dan layanan *digital* seperti BTN Properti, BTN Properti *for Developer*, E-Mitra, hingga aplikasi BTN Smart Residence.
- Selain pengembangan aplikasi tersebut, Perseroan secara rutin menyelenggarakan BTN Properti Expo baik secara *offline* maupun *online* untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat dalam mendapatkan rumah melalui KPR BTN.

3. Peningkatan Akuisisi User dan Active Rate Transaction Melalui Direct Sales

Dalam rangka akuisisi layanan *digital* dan untuk meningkatkan *active rate transaction* dari layanan *digital*, beberapa strategi yang sudah kami jalankan adalah sebagai berikut:

- Program *reward* akuisisi BTN Mobile
Nasabah yang melakukan registrasi dan aktivasi BTN Mobile selama periode program akan mendapatkan *reward* saldo tabungan yang dikreditkan ke rekening nasabah. Program ini berjalan rutin periodik selama tahun 2023 dengan nilai *cashback* yang berbeda-beda sesuai dengan momentum berjalan.

- Program insentif akuisisi untuk Kantor Cabang
 - Kantor Cabang yang berhasil melakukan registrasi layanan *digital* akan mendapatkan *reward* senilai:

Paket Akuisisi	Nilai Reward	Kuota
BTN Mobile Banking/ BTN Internet Banking + SMS Notifikasi	Rp5.000,-/akun	60.000/bulan
BTN Mobile Banking + BTN Internet Banking + SMS Notifikasi	Rp7.500,-/akun	

- Program Jajan Kuliner dengan QRIS BTN Mobile yang dilaksanakan di beberapa kota bekerja sama dengan beberapa *merchant* khas daerah masing-masing kota.
- Program regular untuk meningkatkan transaksi dan *brand awareness* terhadap fitur di BTN Mobile.
- Event offline* telah dilaksanakan di beberapa wilayah dan nasional. Untuk nasional telah dilaksanakan di beberapa *mall*, *event* dan *foodcourt* perkantoran di wilayah Jakarta. Adapun program promonya adalah sebagai berikut:
 - Mall*
Open booth di berbagai mall di Jakarta dan wilayah lainnya.
 - Event*
Kerja sama dengan promotor atau penyelenggara acara lainnya, untuk melakukan kerja sama dengan BTN Mobile (metode: *sponsorship*)
 - Foodcourt*
Promosi berupa membayar makan siang nasabah dengan BTN Mobile. Nasabah yang melakukan registrasi dan aktivasi BTN Mobile di *event offline* akan mendapatkan voucher makan siang di tempat tersebut.
- Melakukan kegiatan aktivasi melalui sosial media seperti melakukan *campaign hashtag*, menciptakan *challenge* di media sosial (seperti: Tiktok), melakukan kolaborasi dengan *influencer* baik mikro, makro, dan medium.
- Melakukan *branding* BTN Mobile di seluruh Kantor Cabang dan Kantor Wilayah Perseroan. Contohnya adalah melakukan *branding* BTN Mobile di gedung kantor dan mobil dinas kantor, serta beberapa fasilitas umum yang bekerja sama dengan instansi pengelola di kota besar.

Pangsa Pasar

Informasi mengenai pangsa pasar Perseroan dibandingkan dengan industri perbankan disajikan sebagai berikut.

Tabel Pangsa Pasar Perseroan dibandingkan dengan Industri Perbankan Indonesia

(dalam triliun Rupiah)

Uraian	Keterangan	September 2023	September 2022
Aset	Industri Perbankan	11.170	10.501
	Bank BTN	410	389
	Pangsa Pasar Bank BTN (%)	3,67%	3,71%
Dana Pihak Ketiga	Industri Perbankan	8.147	7.647
	Bank BTN	324	313
	Pangsa Pasar Bank BTN (%)	3,97%	4,09%
Kredit	Industri Perbankan	6.908	6.338
	Bank BTN	318	290
	Pangsa Pasar Bank BTN (%)	4,61%	4,57%

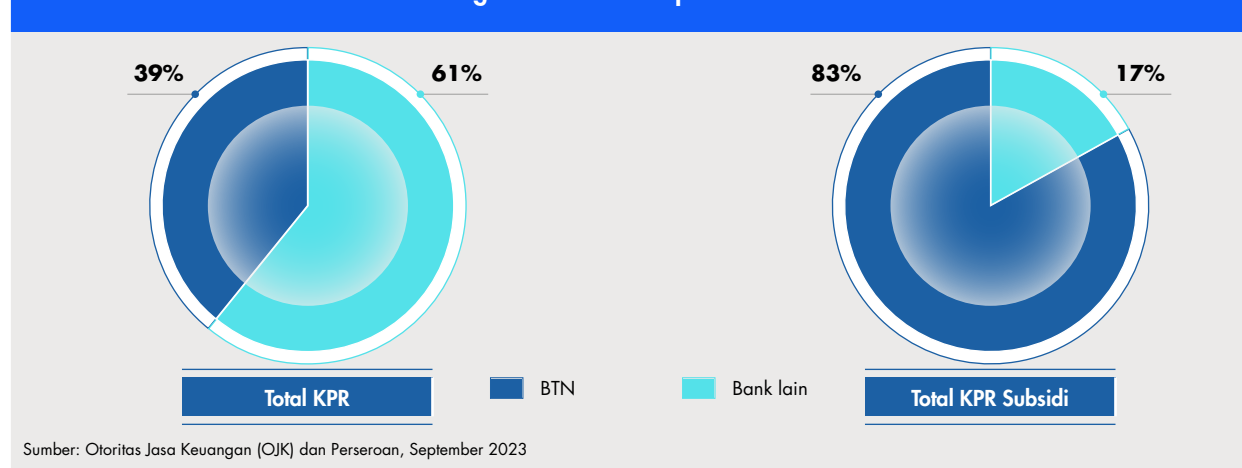
Sumber: Sumber: Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia Bank Indonesia (SEKI BI), Statistik Perbankan Indonesia Otoritas Jasa Keuangan (SPI OJK), Data Internal, diolah.

Aset Perseroan tumbuh sebesar 5,24% secara yoy, lebih rendah dibandingkan pertumbuhan total aset industri perbankan yakni sebesar 6,37% yoy, sehubungan dengan fokus Perseroan di tahun 2022 dalam memperbaiki kualitas bisnis. Hingga September 2023, pangsa pasar Perseroan sebesar 3,67%. Dana Pihak Ketiga (DPK) Perseroan tumbuh sebesar 3,54% yoy, menjadi Rp324 triliun hingga September 2022, lebih rendah dibandingkan pertumbuhan DPK Industri perbankan yang tumbuh 6,54% yoy. Hal ini membuat pangsa pasar DPK Perseroan turun sebesar 12 bps menjadi 3,97% pada September 2023 dari sebelumnya 4,09% pada September 2022. Kredit dan pembiayaan Perseroan tumbuh 9,87% yoy, menjadi Rp318 triliun hingga September 2023, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan kredit perbankan yang tumbuh 8,99% yoy. Hal ini mendorong kenaikan pangsa pasar kredit Perseroan menjadi 4,61% hingga September 2023.

Pangsa Pasar KPR

Sebagai *Provider* KPR terbesar di Indonesia, Perseroan memiliki *market share* sebesar 39% dengan *total outstanding* KPR Rp251 triliun. Kompetitor utama pada bisnis KPR di Indonesia adalah Bank BCA dengan *outstanding* Rp118 triliun, dan diikuti oleh Bank BNI dengan *outstanding* kredit mencapai Rp57 triliun. Sebagai bank yang berfokus pada pembiayaan KPR, baik KPR Subsidi maupun Non Subsidi, Perseroan memiliki pangsa pasar yang besar dalam penyaluran kredit perumahan di Indonesia. Terutama dengan agenda Program Sejuta Rumah dari Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan BP Tapera, Perseroan dipercaya mendapatkan porsi terbesar dalam penyaluran pembiayaan KPR Subsidi. Pada 30 September 2023, pangsa pasar Perseroan pada sektor pembiayaan KPR Subsidi mencapai 83% sementara pangsa pasar Perseroan pada keseluruhan pembiayaan KPR pada 30 September 2023 mencapai 39%.

Pangsa Pasar KPR September 2023





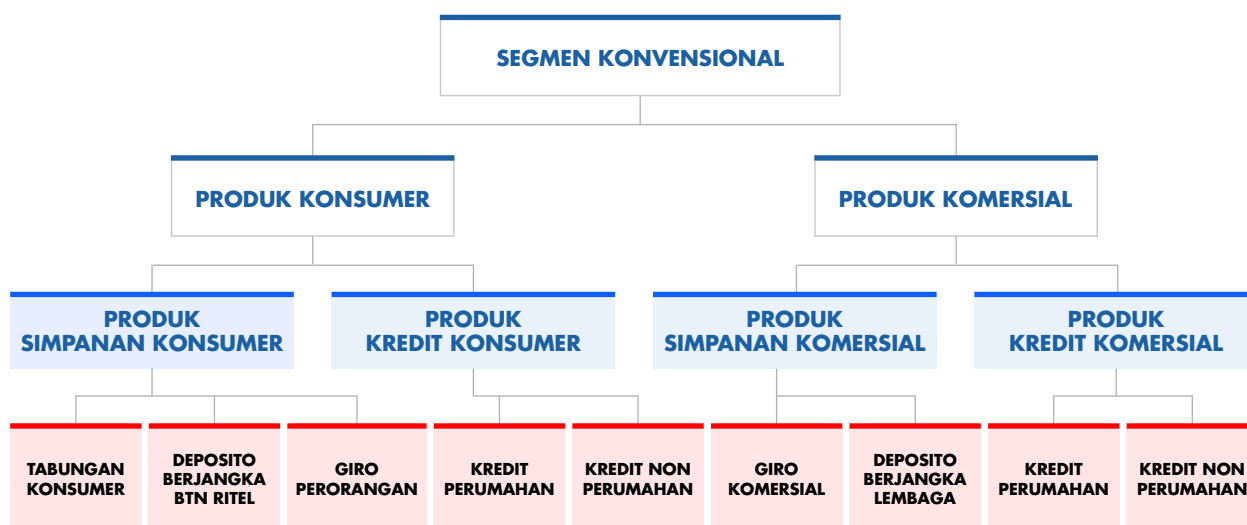
Tinjauan Operasi Per Segmen Usaha

Segmen usaha Perseroan berdasarkan jenis usaha mencakup 2 (dua) segmen utama, yaitu segmen Konvensional dan segmen Syariah. Segmen Konvensional sebagai segmen bisnis utama Perseroan memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan

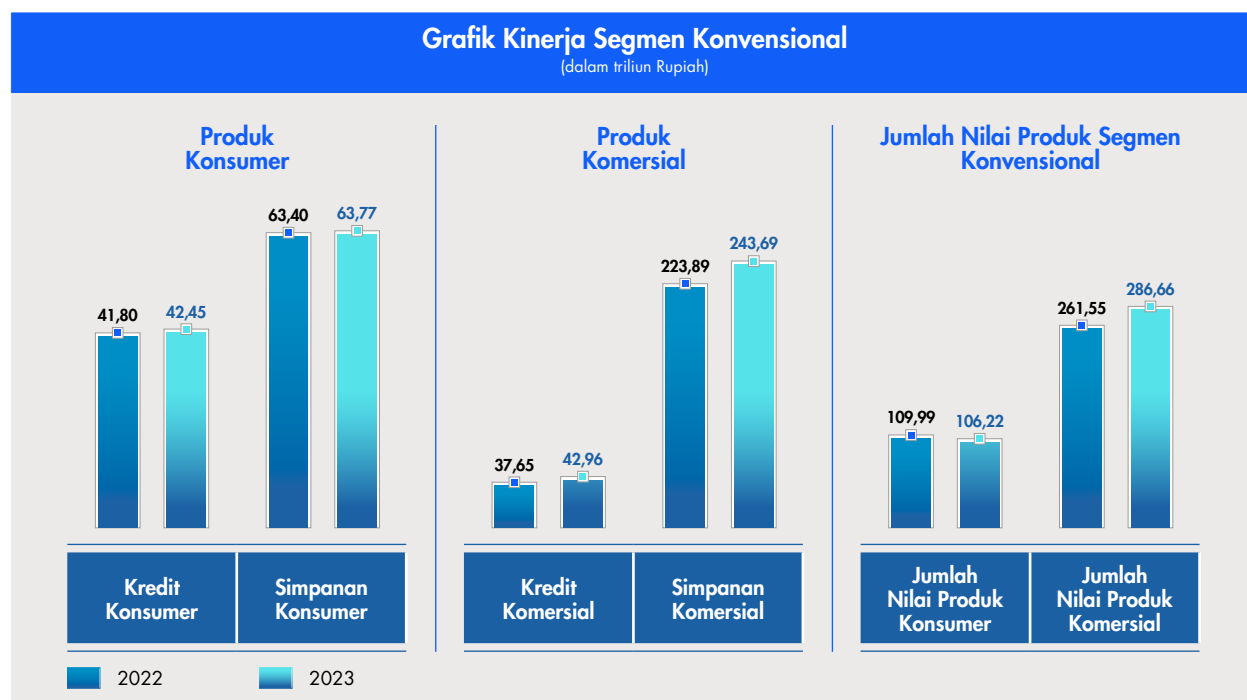
Perseroan. Sedangkan segmen Syariah yang dikembangkan oleh Unit Usaha Syariah (UUS) mengalami pertumbuhan di setiap tahunnya sejalan dengan berbagai upaya dan inisiatif Perseroan.

Segmen Konvensional

Penjelasan dan Produktivitas Segmen Konvensional



Sekilas tentang kinerja dari Segmen Konvensional dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.



Produk Konsumer

Penyaluran produk Perseroan pada Produk Konsumer terbagi menjadi 2 (dua), yaitu Produk Kredit Konsumer dan Produk Simpanan Konsumer. Jumlah nilai Produk Konsumer tahun 2023 sebesar Rp106,22 triliun, menurun 3,42% dibandingkan dengan

tahun 2022 yang sebesar Rp109,99 triliun. Penurunan tersebut disebabkan oleh turunnya dana simpanan Tabungan Konsumer maupun Deposito Berjangka Konsumer pada tahun 2023.

Tabel Nilai Produk Konsumer

(dalam jutaan Rupiah)

Produk Konsumer	2023	2022	Kenaikan/Penurunan	
			Nominal	%
Produk Kredit Konsumer	42.450.499	41.795.595	654.904	1,57%
Produk Simpanan Konsumer	63.770.218	68.190.039	(4.419.821)	(6,48%)
Jumlah Nilai Produk Konsumer	106.220.717	109.985.634	(3.764.917)	(3,42%)

Volume produk kredit konsumer meningkat seiring dengan peningkatan pada NoA produk kredit konsumer yang pada tahun 2023 sebanyak 198.986 unit, meningkat 2,34% dibandingkan

dengan tahun 2022 yang sebanyak 194.438 unit. Di sisi lain Produk Simpanan Konsumer mengalami penurunan 5,66% yang mencapai 6.872.266 rekening di tahun 2023.

Tabel Volume Produk Konsumer

Produk Konsumer	2023	2022	Kenaikan/Penurunan	
			Nominal	Persentase
Produk Kredit Konsumer (unit)	198.986	194.438	4.548	2,34%
Produk Simpanan Konsumer (rekening)	6.872.266	7.284.386	(412.120)	(5,66%)

PRODUK KREDIT KONSUMER

Perseroan menyediakan produk Kredit Konsumer yang terdiri dari Kredit Perumahan dan Kredit Non-Perumahan. Untuk produk Kredit Perumahan diklasifikasikan menjadi KPR Subsidi, KPR Non

Subsidi, dan Kredit Perumahan Lainnya. Seluruh produk kredit perorangan konsumer disalurkan dalam mata uang Rupiah.

Tabel Nilai Penyaluran Produk Kredit Konsumer

(dalam jutaan Rupiah)

Kredit Konsumer	2023	2022	Kenaikan/Penurunan	
			Nominal	Persentase
Kredit Perumahan	38.674.541	33.349.809	5.324.732	15,97%
KPR Subsidi	20.114.296	19.940.148	174.148	0,87%
KPR Non Subsidi	16.191.348	12.066.104	4.125.244	34,19%
Kredit Perumahan Lainnya	2.374.553	1.340.995	1.033.558	77,07%
Kredit Non Perumahan	3.775.958	8.445.786	(4.669.828)	(55,29%)
Jumlah Nilai Penyaluran Kredit Konsumer	42.450.499	41.795.595	654.904	1,57%

Nilai penyaluran produk Kredit Konsumer tahun 2023 sebesar Rp42,45 triliun, meningkat 1,57% dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar Rp41,79 triliun. Peningkatan tersebut

terutama disebabkan oleh peningkatan penyaluran Kredit Perumahan dari KPR Non Subsidi dan Kredit Perumahan Lainnya.



Tabel Volume Penyaluran Produk Kredit Konsumer

(dalam unit)

Kredit Konsumer	2023	2022	Kenaikan/Penurunan	
			Nominal	Persentase
Kredit Perumahan	176.174	173.701	2.473	1,42%
KPR Subsidi	130.787	136.520	(5.733)	(4,20%)
KPR Non Subsidi	36.260	32.019	4.241	13,25%
Kredit Perumahan Lainnya	9.127	5.162	3.965	76,81%
Kredit Non Perumahan	22.812	15.589	7.223	46,33%
Jumlah Volume Penyaluran Kredit Konsumer	198.986	189.290	9.696	5,12%

Volume penyaluran produk Kredit Konsumer tahun 2023 sebanyak 198.986 unit, meningkat 2,34% dibandingkan dengan tahun 2022 yang 194.438 unit. Peningkatan tersebut disebabkan oleh kenaikan volume penyaluran KPR Non Subsidi, Kredit Perumahan Lainnya dan Kredit Non Kredit Non Perumahan.

Kredit Perumahan-KPR Subsidi

Sejak tahun 1976 hingga saat ini, skema penyaluran KPR Subsidi terus berganti, meski demikian Perseroan tetap konsisten menyalurkan KPR Subsidi. KPR Subsidi merupakan program pemilikan rumah dari Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia yang ditujukan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan diterbitkan oleh Bank Pelaksana baik secara konvensional maupun dengan prinsip syariah. Dalam program KPR Bersubsidi, Pemerintah memberikan bantuan dengan penempatan dana murah jangka panjang ataupun subsidi uang muka sehingga cicilan KPR menjadi terjangkau untuk pembelian rumah sejahtera tapak dan rumah sejahtera susun.

Perseroan senantiasa menyediakan berbagai kemudahan dan biaya yang ringan bagi masyarakat yang ingin memiliki rumah melalui program KPR Bersubsidi. Perseroan pertama kali mendapatkan tugas untuk memberikan pelayanan KPR Subsidi sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor B-49/MK/IV/I/1974 tanggal 29 Januari 1974, dengan realisasi KPR pertama berlangsung pada tanggal 10 Desember 1976. Perseroan menyalurkan KPR Subsidi bekerja sama dengan Pemerintah, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Ketentuan mengenai penyaluran KPR Subsidi terakhir diatur dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 35/PRT/M/2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Kemudahan dan Bantuan Pemilikan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, Peraturan Menteri PUPR Nomor 32 tahun 2021 tanggal 1 Desember 2021 tentang Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan, dan Peraturan BP Tapera Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembiayaan Perumahan Bagi Peserta Tabungan Perumahan Rakyat.

Perseroan menyalurkan KPR subsidi menggunakan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), dan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) adalah pembeli rumah pertama kali yang memenuhi persyaratan tertentu dapat memperoleh KPR Subsidi dengan cicilan terjangkau. Berdasarkan peraturan pemerintah yang berlaku saat ini, program KPR Sejahtera FLPP diberikan kepada nasabah yang belum memiliki rumah dengan penghasilan keluarga sebesar Rp8 juta per bulan (untuk pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi) dan Rp10 juta per bulan (untuk pulau Papua). Sementara untuk program KPR Tapera diberikan kepada nasabah yang terdaftar sebagai peserta BP-Tapera dengan penghasilan nasabah sebesar Rp8 juta per bulan (untuk Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi) dan Rp10 juta per bulan (untuk Pulau Papua). Harga rumah yang dibeli melalui program-program tersebut terikat pada batas harga tertentu.

Adapun ketentuan pemberian KPR FLPP Tapak dan Rumah Susun adalah sebagai berikut:

1. Nilai KPR paling banyak sebesar harga jual rumah tapak atau susun dikurangi dengan uang muka yang disiapkan oleh MBR. Melalui program ini, MBR juga berhak mendapatkan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) sebesar Rp4 juta (untuk pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi) dan Rp8 juta (untuk Papua) dari Pemerintah.
2. Suku bunga KPR yang dibayar debitor sebesar 5% per tahun dan sudah termasuk premi asuransi jiwa, asuransi kebakaran, dan asuransi kredit. Suku bunga sebagaimana dimaksud pada butir (1) bersifat tetap selama jangka waktu kredit (*fixed rate*) dengan metode perhitungan bunga tahunan (*annuity*).
3. Sumber pendanaan program FLPP berasal dari 75% dari Pemerintah dan 25% dari Perseroan. Perseroan melakukan kerjasama dengan PT Sarana Multigriya Finansial dalam menyediakan sumber pendanaan bagi program FLPP.
4. Jangka waktu KPR disepakati oleh Perseroan dan MBR yang disesuaikan juga dengan kemampuan membayar angsuran dari calon debitor atau paling lama 20 tahun.

Ketentuan pemberian KPR Tapera adalah sebagai berikut:

1. KPR Tapera diberikan kepada peserta Tapera yang telah memenuhi persyaratan dan urutan prioritas peserta dari BP Tapera.
2. Uang muka KPR Tapera minimal 0% sesuai dengan penilaian Perseroan kepada MBR.
3. Suku bunga KPR yang dibayar debitur sebesar 5% per tahun dan sudah termasuk premi asuransi jiwa, asuransi kebakaran, dan asuransi kredit. Suku bunga sebagaimana

dimaksud pada butir (2) bersifat tetap selama jangka waktu kredit (*fixed rate*) dengan metode perhitungan bunga tahunan (*annuity*).

4. Jangka waktu KPR disepakati oleh Perseroan dan MBR yang disesuaikan juga dengan kemampuan membayar angsuran dari calon debitur atau paling lama 30 tahun.
5. Perseroan akan menerbitkan Efek Beragunan Aset (EBA) sesuai dengan jumlah kredit yang terrealisasikan dengan bekerja sama dengan Bank Kustodian yang ditunjuk oleh BP-Tapera.

Tabel Nilai Penyaluran Produk KPR Subsidi

(dalam jutaan Rupiah)

KPR Subsidi	2023	2022	Kenaikan/Penurunan	
			Nominal	Persentase
KPR BTN Sejahtera Tapak	19.411.272	18.339.646	1.071.626	5,84%
KPR BP2BT	-	982.618	(982.618)	(100,00%)
KPR BTN TAPERA	703.024	617.884	85.140	13,78%
Jumlah Nilai Penyaluran KPR Subsidi	20.114.296	19.940.148	174.148	0,87%

Catatan: *) BP2BT untuk tahun 2023 sudah tidak menyalurkan kembali

Nilai penyaluran KPR Subsidi tahun 2023 sebesar Rp20,11 triliun, meningkat 0,87% dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar Rp19,94 triliun. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya permintaan masyarakat atas kebutuhan rumah sejahtera seiring dengan tumbuhnya ekonomi Indonesia yang sejalan dengan peningkatan kembali aktivitas ekonomi masyarakat pasca pandemi Covid-19.

Sejalan dengan langkah tersebut, Perseroan juga mengembangkan skema pembiayaan yang *equitable* dan inklusif melalui pengembangan produk KPR Subsidi seperti:

New KPR FLPP, KPR Tapera, skema KPR *Rent to Own*. Perseroan juga terus meningkatkan Pangsa KPR Subsidi Perseroan melalui pendalaman kerja sama dengan instansi dan *stakeholder* di bidang perumahan baik dukungan pembiayaan (BP TAPERA, SMF dan Kementerian PUPR), maupun dari sisi *supply* dan *demand*, bekerjasama dengan berbagai instansi/asosiasi (asosiasi pengembang, asosiasi pedagang pasar, perusahaan teknologi seperti gojek, grab dan lainnya) Pengembangan dan perbaikan bisnis proses, penggunaan teknologi terkini serta memperluas bisnis ekosistem juga memberikan dampak positif atas pertumbuhan penyaluran KPR Subsidi Perseroan.

Tabel Volume Penyaluran KPR Subsidi

(dalam unit)

KPR Subsidi	2023	2022	Kenaikan/Penurunan	
			Nominal	Persentase
KPR BTN Sejahtera Tapak	126.312	123.335	2.977	2,41%
KPR BP2BT	-	9.060	(9.060)	(100,00%)
KPR BTN TAPERA	4.514	4.125	389	9,43%
Jumlah Volume Penyaluran KPR Subsidi	130.830	136.520	(5.690)	(4,17%)

Catatan: *) BP2BT untuk tahun 2023 sudah tidak menyalurkan kembali



Volume penyaluran KPR Subsidi tahun 2023 sebanyak 130.830 unit, menurun 4,17% dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebanyak 136.520 unit. Penurunan tersebut dipengaruhi tidak ada penyaluran KPR BP2BT untuk tahun 2023.

Kredit Perumahan-KPR Non Subsidi

Selain KPR Subsidi, Perseroan juga memiliki berbagai layanan KPR Non Subsidi yang menargetkan nasabah berpenghasilan menengah ke atas dengan suku bunga mengambang (*floating*). Jangka waktu yang ditawarkan maksimal selama 25 (dua puluh

lima) tahun untuk KPR Non Subsidi dan maksimal 15 (lima belas) tahun untuk Kredit Pemilikan Apartemen (KPA) dan Kredit Ruko. KPR Non Subsidi Perseroan memberikan layanan untuk keperluan pembelian rumah dari developer ataupun *non-developer*, baik untuk pembelian rumah baru atau *second*, pembelian rumah siap huni (*ready stock*) atau belum jadi (*indent*), maupun *take over* kredit dari bank lain. Ketentuan uang muka minimal 15% atau sesuai Peraturan Bank Indonesia tentang Rasio *Loan to Value* (LTV). Perseroan menyalurkan kredit KPR Non Subsidi melalui beberapa produk yaitu KPR BTN Platinum, KPA BTN dan Kredit Ruko BTN.

Tabel Nilai Penyaluran Produk KPR Non Subsidi

(dalam jutaan Rupiah)

KPR Subsidi	2023	2022	Kenaikan/Penurunan	
			Nominal	Persentase
KPR BTN Platinum	15.934.162	11.845.846	4.088.316	34,51%
KPA BTN	136.875	194.871	(57.996)	(29,76%)
Kredit Ruko BTN	120.311	25.387	94.924	373,91%
Jumlah Nilai Penyaluran KPR Non Subsidi	16.191.348	12.066.104	4.125.244	34,19%

Nilai penyaluran KPR Non Subsidi tahun 2023 sebesar Rp16,19 triliun, meningkat 34,19% dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar Rp12,07 triliun. Peningkatan tersebut terutama

disebabkan oleh peningkatan nilai penyaluran KPR BTN Platinum sebesar 34,51%.

Tabel Volume Penyaluran KPR Non Subsidi

(dalam unit)

KPR Subsidi	2023	2022	Kenaikan/Penurunan	
			Nominal	Persentase
KPR BTN Platinum	35.906	31.581	4.325	13,69%
KPA BTN	217	384	(167)	(43,49%)
Kredit Ruko BTN	137	54	83	153,70%
Jumlah Volume Penyaluran KPR Non Subsidi	36.260	32.019	4.241	13,25%

Volume penyaluran KPR Non Subsidi tahun 2023 sebanyak 36.260 unit, meningkat 13,25% dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebanyak 31.581 unit. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan volume penyaluran KPR BTN Platinum sebesar 13,69%. Peningkatan penyaluran KPR Non Subsidi ini didorong oleh Implementasi beberapa inisiatif Perseroan di tahun 2023 seperti:

1. *Upselling* KPR Non Subsidi kepada nasabah eksisting Perseroan yang sudah 'lulus' (*graduating*)
2. Mengembangkan skema pendanaan dari TAPERA, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja (BPJS TK) dan Dana Pensiun untuk penyediaan perumahan yang terjangkau.
3. Meningkatkan bisnis perumahan di segmen emerging affluent dan *mass affluent* dengan bekerja sama dengan perusahaan *Top 20 developer* swasta nasional

4. Mengembangkan segmen *Direct to Consumer* (D2C) bekerja sama dengan agen properti nasional.
5. Peningkatan portofolio produk KPR Non Subsidi melalui *channel online* BTN Properti.

Kredit Perumahan-Kredit Perumahan Lainnya

Perseroan juga menawarkan jenis-jenis Kredit Perumahan serta Kredit Konsumer Lainnya, yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan konsumen. Kredit Perumahan Lainnya merupakan upaya Perseroan dalam mengembangkan bisnis sekaligus ditujukan untuk membantu konsumen memiliki hunian dengan keuntungan dan kemudahan yang tinggi. Perseroan menyalurkan Kredit Perumahan Lainnya melalui beberapa produk yaitu Kredit Agunan Rumah, Kredit Bangun Rumah dan Pinjaman Renovasi Rumah Kerjasama Bank (PRR-KB) BPJS Ketenagakerjaan

Tabel Nilai Penyaluran Kredit Perumahan Lainnya

(dalam jutaan Rupiah)

Kredit Perumahan Lainnya	2023	2022	Kenaikan/Penurunan	
			Nominal	Persentase
Kredit Agunan Rumah	2.347.810	1.305.831	1.041.979	79,79%
Kredit Bangun Rumah	3.150	1.310	1.840	140,46%
PRR-KB BPJS Ketenagakerjaan	23.593	33.854	(10.261)	(30,31%)
Jumlah Nilai Penyaluran Kredit Perumahan Lainnya	2.374.553	1.340.995	1.033.558	77,07%

Nilai penyaluran Kredit Perumahan Lainnya tahun 2023 sebesar Rp2,37 triliun, meningkat 77,07% dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar Rp1,34 triliun. Peningkatan tersebut

terutama disebabkan oleh peningkatan nilai penyaluran Kredit Agunan Rumah sebesar 79,79% dan Kredit Bangun Rumah sebesar 140,46%.

Tabel Volume Penyaluran Kredit Perumahan Lainnya

(dalam unit)

Kredit Perumahan Lainnya	2023	2022	Kenaikan/Penurunan	
			Nominal	Persentase
Kredit Agunan Rumah	8.944	4.920	4.024	81,79%
Kredit Bangun Rumah	11	5	6	120,00%
PRR-KB BPJS Ketenagakerjaan	160	216	(56)	(25,93%)
Jumlah Volume Penyaluran Kredit Perumahan Lainnya	9.115	5.141	3.974	77,30%

Volume penyaluran Kredit Perumahan Lainnya tahun 2023 sebanyak 9.115 unit, meningkat 77,30% dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebanyak 5.141 unit. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan volume Kredit Agunan Rumah dan Kredit Bangun Rumah sebesar 81,79% dan 120,00% seiring dengan strategi Perseroan untuk memperbesar porsi bisnis kredit bermargin tinggi di tahun 2023.

Kredit Non Perumahan

Perseroan memberikan Kredit Konsumer Lainnya, di luar Kredit Perumahan yang digunakan untuk berbagai kebutuhan nasabah kredit. Perseroan menyalurkan Kredit Non Perumahan melalui beberapa produk yaitu Kring BTN, Kring BTN Pensiunan, Kredit Swadana BTN dan Kredit Pegawai.

Tabel Nilai Penyaluran Kredit Non Perumahan

(dalam jutaan Rupiah)

Kredit Non Perumahan	2023	2022	Kenaikan/Penurunan	
			Nominal	Persentase
Kring BTN	2.161.227	1.622.150	539.077	33,23%
Kring BTN Pensiunan	169.238	112.482	56.756	50,46%
Kredit Swadana BTN	1.264.244	6.673.308	(5.409.064)	(81,06%)
Kredit Pegawai	181.249	37.846	143.403	378,91%
Jumlah Nilai Penyaluran Kredit Non Perumahan	3.775.958	8.445.786	(4.669.828)	(55,29%)

Nilai penyaluran Kredit Non Perumahan tahun 2023 sebesar Rp3,78 triliun, menurun 55,29% dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebanyak Rp8,44 triliun. Hal tersebut disebabkan

oleh menurunnya nilai penyaluran Kredit Swadana BTN sebesar 81,06%.

Tabel Volume Penyaluran Kredit Non Perumahan

(dalam unit)

Kredit Non Perumahan	2023	2022	Kenaikan/Penurunan	
			Nominal	Persentase
Kring BTN	19.133	13.771	5.362	38,94%
Kring BTN Pensiunan	1.651	1.092	559	51,19%
Kredit Swadana BTN	1.613	5.720	(4.107)	(71,80%)
Kredit Pegawai	415	154	261	169,48%
Jumlah Volume Penyaluran Kredit Non Perumahan	22.812	20.737	2.075	10,01%

Volume penyaluran Kredit Non Perumahan tahun 2023 sebanyak 22.812 unit, meningkat 10,01% dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebanyak 20.737 unit. Peningkatan tersebut disebabkan oleh meningkatnya penyaluran Kring BTN sebesar 38,94%, Kring BTN Pensiunan sebesar 51,19%, Kredit Pegawai sebesar 169,48%

Peningkatan penyaluran Kredit Non Perumahan ini didorong oleh Implementasi beberapa inisiatif Perseroan di tahun 2023 sebagai berikut:

1. Kerja sama dengan instansi Pemerintah, BUMN dan Perusahaan Swasta dengan privilege suku bunga fasilitas KPR/KPA dan Kredit Ringan Perseroan dengan syarat *payroll* di Perseroan

2. Pengembangan *platform* BTN Ready (*Credit Digital for You/for Y Generation*) Fase I.
3. Memperkuat kerja sama dengan mitra strategis dan memperluas *supply chain*-optimalisasi kerja sama dengan instansi via BTN solusi, *payroll* dan kolektif.

PRODUK SIMPANAN KONSUMER

Perseroan menyediakan beragam produk simpanan untuk menjawab kebutuhan simpanan kepada nasabah, yang dikelompokkan menjadi 2 (dua) produk, yaitu Tabungan dan Deposito. Melalui penyediaan produk tersebut, Perseroan berupaya untuk menjaga tingkat likuiditas yang sehat, sumber dana berbiaya murah yang sejalan dengan strategi Perseroan untuk mempertahankan komposisi pendanaan yang kompetitif dan terjangkau.

Tabel Jumlah Dana Simpanan Konsumer

(dalam jutaan Rupiah)

Simpanan Konsumer	2023	2022	Kenaikan/Penurunan	
			Nominal	Persentase
Tabungan Konsumer	37.045.734	40.970.057	(3.924.323)	(9,58%)
Deposito Berjangka	26.724.484	27.219.982	(495.498)	(1,82%)
Jumlah Dana Simpanan Konsumer	63.770.218	68.190.039	(4.419.821)	(6,48%)

Jumlah dana Simpanan Konsumer tahun 2023 sebesar Rp63,77 triliun, menurun 6,48% dibandingkan dengan tahun 2022 yang

sebesar Rp63,40 triliun. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh turunnya Tabungan Konsumer sebesar 9,58%.

Tabel Jumlah Rekening Simpanan Konsumer

(dalam rekening)

Simpanan Konsumer	2023	2022	Kenaikan/Penurunan	
			Nominal	Persentase
Tabungan Konsumer	6.779.607	7.193.794	(414.187)	(5,76%)
Deposito Berjangka	92.659	90.592	2.067	2,28%
Jumlah Rekening Simpanan Konsumer	6.872.266	7.284.386	(412.120)	(5,66%)

Jumlah rekening Simpanan Konsumer tahun 2023 sebanyak 6.872.266 rekening, menurun 5,66% dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebanyak 7.284.386 rekening. Penurunan

tersebut terutama disebabkan oleh turunnya jumlah rekening Tabungan Konsumer sebesar 5,76%.

Tabungan Konsumer

Tabungan konsumer yang dimiliki Perseroan memberikan solusi tabungan transaksional dengan kemudahan transaksi pembelian dan pembayaran melalui *channel* Perseroan untuk menunjang aktivitas keuangan konsumen. Tabungan Konsumer Perseroan dikembangkan melalui beberapa produk sebagai berikut:

1. Tabungan Batara
2. Tabungan Bisnis
3. Tabungan Investa
4. Tabungan Lainnya, meliputi beberapa produk yaitu:
 - a. Tabungan BTN Payroll
 - b. Tabungan BTN Pensiunan
 - c. Tabungan BTN Siap!
 - d. Tabungan BTN Felas
 - e. Tabungan Juara
 - f. TabunganKu
 - g. Tabungan BTN Sempel
 - h. Tabungan Cermat
 - i. Tabungan BTN Perumahan
 - j. Tabungan BTN Haji Reguler
 - k. Tabungan BTN Haji Plus
 - l. Tabungan Simuda Rumahku
 - m. Tabungan Batara Pendidik
 - n. Tabungan Batara Tax Amnesty
 - o. Tabungan BTN Batara RDN
5. Tabungan eBatara Pos

Tabel Jumlah Tabungan Konsumer

(dalam jutaan Rupiah)

Tabungan Konsumer	2023	2022	Kenaikan/Penurunan	
			Nominal	Persentase
Tabungan Batara	14.309.848	15.945.562	(1.635.714)	(10,26%)
Tabungan Bisnis	3.107.035	2.281.670	825.365	36,17%
Tabungan Investa	12.451.489	10.543.816	1.907.673	18,09%
Tabungan BTN Pensiunan	247.986	217.661	30.325	13,93%
Tabungan Batara Pendidik	181.773	160.781	20.992	13,06%
Tabungan Batara Prima	1.141.538	2.112.185	(970.647)	(45,95%)
Tabungan Batara Tax Amnesty	5.719	2.418	3.301	136,52%
Tabungan KPR Mass	40.912	118.783	(77.871)	(65,56%)
Tabungan BTN Batara RDN	7.073	7.447	(374)	(5,02%)
Tabungan Lainnya	3.603.684	2.613.426	990.258	37,89%
Tabungan BTN Junior	518.793	615.681	(96.888)	(15,74%)
Tabungan BTN Juara	732.105	748.512	(16.407)	(2,19%)
TabunganKu	951.420	924.881	26.539	2,87%
Tabungan BTN Sempel	161.175	103.371	57.804	55,92%
Tabungan Cermat	951.420	20.763	930.657	4.482,29%
Tabungan BTN Perumahan	22.416	25.738	(3.322)	(12,91%)
Tabungan BTN Haji Reguler	-	-	-	-
Tabungan BTN Haji Plus	-	-	-	-
Tabungan BTN Siap!	73.517	71.787	1.730	2,41%
Tabungan Felas	192.807	102.646	90.161	87,84%
Tabungan Simuda Rumahku	31	47	(16)	(34,04%)
Tabungan Pos	1.948.677	2.176.441	(227.764)	(10,46%)
Tabungan Tabanas Batara	13.657	15.867	(2.210)	(13,93%)
Tabungan eBatara Pos	1.935.020	2.160.574	(225.554)	(10,44%)
Jumlah Dana Tabungan Konsumer	37.045.734	36.180.190	865.544	2,39%

Jumlah dana Tabungan Konsumer tahun 2023 sebesar Rp37,05 triliun, meningkat 2,39% dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar Rp36,18 triliun. Peningkatan tersebut terutama

disebabkan oleh pertumbuhan Tabungan Investa sebesar Rp1,92 triliun.

Tabel Jumlah Rekening Tabungan Konsumer

(rekening)

Tabungan Konsumer	2023	2022	Kenaikan/Penurunan	
			Nominal	Persentase
Tabungan Batara	2.880.855	3.263.730	(382.875)	(11,73%)
Tabungan Investa	7.535	7.559	(24)	(0,32%)
Tabungan BTN Pensiunan	27.746	20.093	7.653	38,09%
Tabungan Batara Pendidik	63.789	101.228	(37.439)	(36,98%)
Tabungan Batara Prima	10.483	15.268	(4.785)	(31,34%)
Tabungan Batara Tax Amnesty	23	21	2	9,52%
Tabungan KPR Mass	69.127	76.495	(7.368)	(9,63%)
Tabungan BTN Batara RDN	4.466	4.556	(90)	(1,98%)
Tabungan Lainnya	3.092.363	3.037.945	54.418	1,79%
Tabungan BTN Junior	111.110	123.165	(12.055)	(9,79%)
Tabungan BTN Juara	556.006	511.129	44.877	8,78%
TabunganKu	1.448.630	1.487.288	(38.658)	(2,60%)
Tabungan BTN Simpel	795.592	742.308	53.284	7,18%
Tabungan Cermat	123.211	123.214	(3)	0,00%
Tabungan BTN Perumahan	2.617	2.785	(168)	(6,03%)
Tabungan BTN Haji Reguler	2	2	-	0,00%
Tabungan BTN Haji Plus	259	259	-	0,00%
Tabungan BTN Siap!	53.936	47.165	6.771	14,36%
Tabungan Felas	998	622	376	60,45%
Tabungan Simuda Rumahku	2	8	(6)	(75,00%)
Tabungan Pos	587.969	642.183	(54.214)	(8,44%)
Tabungan Tabanas Batara	2.202	2.932	(730)	(24,90%)
Tabungan eBatara Pos	585.767	639.251	(53.484)	(8,37%)
Tabungan Bisnis	35.251	24.716	10.535	42,62%
Jumlah Rekening Tabungan Konsumer	6.779.607	7.193.794	(414.187)	(5,76%)

Jumlah rekening Tabungan Konsumer tahun 2023 sebanyak 6,78 juta rekening, menurun 5,76% dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar 7,19 juta rekening. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh turunnya rekening dari Tabungan Pos sebanyak 54.214 rekening.

Deposito Berjangka BTN Ritel

Produk deposito berjangka Perseroan memberikan kemudahan kepada konsumen atau nasabah untuk investasi berjangka dengan benefit yang tinggi. Investasi yang dilakukan dalam mata uang Rupiah dengan suku bunga yang menarik dan bersaing. Produk Deposito Berjangka BTN Ritel ditawarkan dengan jangka waktu jatuh tempo 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan > 12 bulan, serta *Deposito On Call*.

Tabel Jumlah Deposito Berjangka

(dalam jutaan Rupiah)

Deposito Berjangka	2023	2022	Kenaikan/Penurunan	
			Nominal	Persentase
1 bulan	8.293.915	12.132.350	(3.838.435)	(31,64%)
2 bulan	447.053	798.656	(351.603)	(44,02%)
3 bulan	11.878.796	11.929.638	(50.842)	(0,43%)
4 Bulan	768.713	408.758	359.955	88,06%
6 bulan	2.016.777	1.422.113	594.664	41,82%
> 12 bulan	327.305	375.519	(48.214)	(12,84%)
E-Depo				
1 Bulan	889.459	2.036	887.423	43.586,59%
2 Bulan	52.986	-	52.986	100,00%
3 Bulan	1.001.338	1.864	999.474	53.619,85%
4 Bulan	223.584	-	223.584	100,00%
6 Bulan	597.071	759	596.312	78.565,48%
12 Bulan	17.026	17	17.009	100.052,94%
Deposito On Call	210.461	132.704	77.757	58,59%
DHE	-	15.568	(15.568)	(100,00%)
Jumlah Dana Deposito Berjangka	26.724.484	27.219.982	(495.498)	(1,82%)

Jumlah Deposito Berjangka tahun 2023 sebesar Rp26,72 triliun, menurun 1,82% dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar Rp27,22 triliun. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh

turunnya Deposito pada jangka waktu 1 bulan sebesar Rp3,84 triliun.

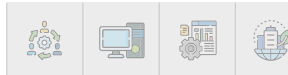
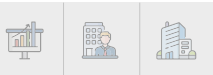
Tabel Jumlah Rekening Deposito Berjangka

(rekening)

Deposito Berjangka	2023	2022	Kenaikan/Penurunan	
			Nominal	Persentase
1 bulan	43.687	52.685	(8.998)	(17,08%)
2 bulan	1.273	1.634	(361)	(22,09%)
3 bulan	22.970	24.482	(1.512)	(6,18%)
4 Bulan	203	196	7	3,57%
6 bulan	8.628	8.562	66	0,77%
> 12 bulan	2.839	2.924	(85)	(2,91%)
E-Depo				
1 Bulan	5.599	55	5.544	10.080,00%
2 Bulan	479	-	479	100,00%
3 Bulan	4.340	9	4.331	48.122,22%
4 Bulan	559	-	559	100,00%
6 Bulan	1.772	5	1.767	35.340,00%
12 Bulan	296	2	294	14.700,00%
Deposito On Call	14	37	(23)	(62,16%)
DHE	-	1	(1)	(100,00%)
Jumlah Rekening Deposito Berjangka	92.665	90.592	2.067	2,28%

Jumlah Rekening Deposito Berjangka tahun 2023 sebesar 92.665 rekening, meningkat 2,28% dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar 90.592 rekening. Peningkatan tersebut terutama

disebabkan oleh kenaikan E-Depo pada jangka waktu 1 bulan sebesar 5.544 rekening.



Produk Komersial

Portofolio produk Perseroan pada Produk Komersial terbagi menjadi 2 (dua), yaitu Produk Kredit Komersial dan Produk Simpanan Komersial.

Tabel Nilai Produk Komersial

(dalam jutaan Rupiah)

Produk Komersial	2023	2022	Kenaikan/Penurunan	
			Nominal	Persentase
Produk Kredit Komersial	42.963.396	37.654.912	5.308.484	14,10%
Produk Simpanan Komersial	243.694.432	223.893.013	19.801.419	8,84%
Jumlah Nilai Produk Komersial	286.657.828	261.547.925	25.109.903	9,60%

Jumlah nilai Produk Komersial tahun 2023 sebesar Rp286,66 triliun, meningkat 9,60% dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar Rp261,55 triliun. Peningkatan tersebut disebabkan

oleh kenaikan penyaluran produk Kredit Komersial sebesar 21,02% dan produk Simpanan Komersial sebesar 7,68%.

Tabel Volume Penyaluran Produk Komersial

Produk Komersial	2023	2022	Kenaikan/Penurunan	
			Nominal	Persentase
Produk Kredit Komersial (Unit)	17.416	11.538	5.878	50,94%
Produk Simpanan Komersial (Rekening)	154.772	66.764	88.008	131,82%

Jumlah produk Kredit Komersial tahun 2023 sebanyak 17.416 unit atau meningkat 50,94% dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebanyak 11.538 unit. Jumlah produk Simpanan Komersial tahun 2023 sebanyak 154.772 rekening atau meningkat 131,82% dibandingkan dengan jumlah rekening tahun 2022, yaitu sebanyak 66.764 rekening. Peningkatan volume penyaluran produk Komersial paling tinggi dikontribusi dari pertumbuhan produk Simpanan Komersial yang didominasi oleh penambahan rekening Giro dengan peningkatan sebesar 86.228 rekening atau 149,56%.

PRODUK KREDIT KOMERSIAL

Perseroan menyediakan produk kredit perbankan komersial untuk memberikan beragam solusi bagi konsumen dengan produk yang terdiri dari produk Kredit Perumahan dan Kredit Non Perumahan. Kredit perumahan berupa Kredit Konstruksi, sedangkan Kredit Non Perumahan terdiri dari Kredit UMKM dan Kredit Komersial Lainnya (KI, KMK dan KMK Kontraktor).

Tabel Nilai Penyaluran Produk Kredit Komersial

(dalam jutaan Rupiah)

Kredit Komersial	2023	2022	Kenaikan/Penurunan	
			Nominal	Persentase
Kredit Perumahan				
Kredit Konstruksi	10.065.987	6.289.738	3.776.249	60,04%
Kredit Non Perumahan				
Kredit UMKM	6.722.689	5.590.911	1.131.778	20,24%
Kredit Komersial Lainnya	26.174.720	25.774.215	400.505	1,55%
Jumlah Nilai Penyaluran Kredit Komersial	42.963.396	37.654.864	5.308.532	14,10%

Nilai penyaluran Kredit Komersial tahun 2023 sebesar Rp42,97 triliun, meningkat 14,10% dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar Rp37,65 triliun. Peningkatan tersebut terutama

disebabkan oleh peningkatan penyaluran Kredit Konstruksi sebesar Rp3,78 triliun atau meningkat 60,04%.

Tabel Volume Penyaluran Produk Kredit Komersial

(dalam unit)

Kredit Komersial	2023	2022	Kenaikan/Penurunan	
			Nominal	Persentase
Kredit Perumahan				
Kredit Konstruksi	5.797	4.811	986	20,49%
Kredit Non Perumahan				
Kredit UMKM	11.067	6.208	4.859	78,27%
Kredit Komersial Lainnya	552	519	33	6,36%
Jumlah Volume Penyaluran Kredit Komersial	17.416	11.538	5.878	50,94%

Volume penyaluran Kredit Komersial tahun 2023 sebanyak 17.416 unit, meningkat 50,94% dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebanyak 11.538 unit. Peningkatan tersebut disebabkan oleh kenaikan penyaluran Kredit UMKM sebesar 78,27%, Kredit Konstruksi sebesar 20,49% dan Kredit Komersial Lainnya sebesar 6,36%.

Kredit Perumahan – Kredit Konstruksi

Kredit Perumahan pada Produk Komersial adalah Kredit Konstruksi. Perseroan memberikan beragam solusi pembangunan properti dengan banyak kemudahan dan keuntungan yang ditawarkan. Perseroan menyediakan kredit konstruksi kepada pengembang perumahan untuk tujuan modal kerja yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan rumah dan apartemen. Untuk jenis kredit ini, Perseroan memberikan kredit maksimal hingga 80% dari biaya pembangunan atau konstruksi dengan suku bunga mengambang. Fasilitas kredit konstruksi memberikan kemudahan bagi nasabah perbankan komersial untuk melakukan pengembangan dalam pembangunan bangunan horizontal maupun bangunan vertikal/ high rise building termasuk sarana dan prasarannya.

Kredit Konstruksi memiliki peran strategis dalam mendukung Program Sejuta Rumah karena penyaluran kredit tersebut mampu menciptakan *supply* rumah. Dalam membuat keputusan untuk membiayai kredit konstruksi, Perseroan memperhitungkan periode jatuh tempo berdasarkan perkiraan masa konstruksi. Kredit konstruksi dijamin dengan agunan berupa tanah dan bangunan yang akan dibangun di atas tanah.

Nasabah perbankan komersial yang telah mendapatkan Kredit Konstruksi BTN juga dapat memperoleh Kredit Kepemilikan Lahan, Perseroan menyediakan kredit untuk tujuan memperoleh lahan yang akan digunakan untuk membangun hunian dan apartemen bersubsidi, dalam jumlah sampai dengan 70% dari biaya Jangka waktu kredit ini mengikuti jangka waktu kredit konstruksinya dan dijamin dengan agunan berupa tanah yang diperoleh dan bangunan yang dibiayai. dengan tiga tahun dan dijamin dengan agunan berupa tanah yang diperoleh dan bangunan yang dibiayai.

Perseroan menyalurkan Kredit Konstruksi melalui 2 (dua) produk yaitu Kredit Konstruksi BTN dan Kredit Konstruksi Korporasi

Tabel Jumlah Nilai Penyaluran Kredit Konstruksi

(dalam jutaan Rupiah)

Kredit Konstruksi	2023	2022	Kenaikan/Penurunan	
			Nominal	Persentase
Kredit Konstruksi BTN	9.985.027	5.909.506	4.075.521	68,97%
Kredit Konstruksi Korporasi	80.960	380.232	(299.272)	(78,71%)
Jumlah Nilai Penyaluran Kredit Konstruksi	10.065.987	6.289.738	3.776.249	60,04%

Nilai penyaluran produk Kredit Konstruksi tahun 2023 sebesar Rp10,07 triliun, meningkat 60,04% dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar Rp6,29 triliun. Peningkatan tersebut

terutama disebabkan oleh kenaikan penyaluran kredit konstruksi BTN sebesar 68,97%.

Tabel Volume Penyaluran Kredit Konstruksi

(dalam unit)

Kredit Konstruksi	2023	2022	Kenaikan/Penurunan	
			Nominal	Persentase
Kredit Konstruksi BTN	5.793	4.801	992	20,66%
Kredit Konstruksi Korporasi	4	10	(6)	(60,00%)
Jumlah Volume Kredit Konstruksi	5.797	4.811	986	20,49%



Volume penyaluran Kredit Konstruksi tahun 2023 sebanyak 5.797 unit, meningkat 20,49% dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebanyak 4.811 unit. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh naiknya volume Kredit Konstruksi BTN sebesar 20,66%.

Kredit Non Perumahan-Kredit Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM)

Perseroan menyediakan Kredit UMKM sebagai solusi bagi pengusaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) serta bertujuan menyalurkan pembiayaan usaha yang produktif. Perseroan menyalurkan Kredit UMKM melalui beberapa produk yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Usaha Mikro Kecil (KUMK), Kredit Modal Kerja (KMK), Kredit Investasi UMKM, KMK Kontraktor UMKM.

Tabel Nilai Penyaluran Kredit UMKM

(dalam jutaan Rupiah)

Kredit UMKM	2023	2022	Kenaikan/Penurunan	
			Nominal	Persentase
KUR	1.807.673	602.060	1.205.613	200,25%
KUMK	2.199.676	2.314.423	(114.747)	(4,96%)
KMK	2.652.068	2.647.619	4.449	0,17%
Kredit Investasi UMKM	15.804	3.740	12.064	322,57%
KMK Kontraktor UMKM	47.468	23.069	24.399	105,77%
Jumlah Nilai Penyaluran Kredit UMKM	6.722.689	5.590.911	1.131.778	20,24%

Nilai penyaluran produk Kredit UMKM tahun 2023 sebesar Rp6,72 triliun, meningkat 20,24% dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar Rp5,59 triliun. Peningkatan tersebut

terutama disebabkan oleh peningkatan penyaluran KUR sebesar 200,25%.

Tabel Volume Penyaluran Produk Kredit UMKM

(dalam unit)

Kredit UMKM	2023	2022	Kenaikan/Penurunan	
			Nominal	Persentase
KUR	8.214	2.475	5.739	231,88%
KUMK	1.405	2.309	(904)	(39,15%)
KMK	1.404	1.398	6	0,43%
Kredit Investasi UMKM	10	4	6	150,00%
KMK Kontraktor UMKM	34	22	12	54,55%
Jumlah Volume Penyaluran Kredit UMKM	11.067	6.208	4.859	78,27%

Volume penyaluran produk Kredit UMKM tahun 2023 sebanyak 11.067 unit, meningkat 78,27% dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebanyak 6.208 unit. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya volume UMKM pada produk KUR sebesar 231,88%.

Kredit Non Perumahan - Kredit Komersial Lainnya

Perseroan memasarkan Kredit Non Perumahan berupa Kredit Komersial selain dengan memberikan bunga yang kompetitif juga pelayanan prima yang ditawarkan. Kredit Komersial disalurkan Perseroan melalui beberapa produk yaitu Kredit Modal Kerja (KMK), Kredit Investasi dan KMK Kontraktor.

Tabel Nilai Penyaluran Kredit Komersial Lainnya

(dalam jutaan Rupiah)

Kredit Komersial Lainnya	2023	2022	Kenaikan/Penurunan	
			Nominal	Persentase
KMK	13.529.919	14.748.648	(1.218.729)	(8,26%)
Kredit Investasi	9.721.086	5.432.790	4.288.296	78,93%
KMK Kontraktor	1.069.715	1.077.825	(8.110)	(0,75%)

Kredit Komersial Lainnya	2023	2022	Kenaikan/Penurunan	
			Nominal	Persentase
TLF	1.854.000	4.515.000	(2.661.000)	(58,94%)
Jumlah Nilai Penyaluran Kredit Komersial Lainnya	26.174.720	25.774.263	400.457	1,55%

Nilai penyaluran produk Kredit Komersial Lainnya tahun 2023 sebesar Rp26,17 triliun, meningkat 1,55% dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar Rp25,77 triliun. Peningkatan

tersebut terutama disebabkan oleh naiknya penyaluran Kredit Investasi sebesar 78,93%.

Tabel Volume Penyaluran Kredit Komersial Lainnya

(dalam unit)

Kredit Komersial Lainnya	2023	2022	Kenaikan/Penurunan	
			Nominal	Persentase
KMK	404	436	(32)	(7,34%)
Kredit Investasi	64	19	45	236,84%
KMK Kontraktor	78	58	20	34,48%
TLF	6	6	-	0,00%
Jumlah Volume Penyaluran Kredit Komersial Lainnya	552	519	33	6,36%

Volume penyaluran Kredit Komersial Lainnya tahun 2023 sebanyak 552 unit, meningkat 6,36% dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebanyak 519 unit. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh naiknya volume Kredit Investasi sebesar 236,84%.

PRODUK SIMPANAN KOMERSIAL

Perseroan menyediakan produk dan layanan pendanaan untuk segmen perbankan komersial yang meliputi Giro dan Deposito Berjangka Lembaga.

Tabel Jumlah Dana Simpanan Komersial

(dalam jutaan Rupiah)

Simpanan Komersial	2023	2022	Kenaikan/Penurunan	
			Nominal	Persentase
Giro Komersial	129.369.288	104.900.918	24.468.370	23,33%
Deposito Berjangka Lembaga	114.313.403	118.992.095	(4.678.692)	(3,93%)
Jumlah Dana Simpanan Komersial	243.694.432	223.893.013	19.801.419	8,84%

Jumlah dana produk Simpanan Komersial tahun 2023 sebesar Rp243,69 triliun, meningkat 8,84% dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar Rp223,89 triliun. Peningkatan tersebut

terutama disebabkan oleh pertumbuhan Giro Komersial sebesar 23,33%.

Tabel Jumlah Rekening Dana Simpanan Komersial

(dalam rekening)

Simpanan Komersial	2023	2022	Kenaikan/Penurunan	
			Nominal	Persentase
Giro Komersial	143.891	57.663	86.228	149,54%
Deposito Berjangka Lembaga	10.881	9.101	1.780	19,56%
Jumlah Rekening Dana Simpanan Komersial	154.772	66.764	88.008	131,82%

Jumlah rekening produk Simpanan Komersial tahun 2023 sebanyak 154.772 rekening, meningkat 131,82% dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebanyak 66.764 rekening.

Peningkatan tersebut terutama disebabkan pertumbuhan yang berasal dari produk Giro Komersial yaitu sebanyak 86.228 rekening atau meningkat 149,54%.



Giro Komersial

Perseroan memberikan layanan penyimpanan dana dalam bentuk Giro melalui Giro FLPP dan Giro Non FLPP.

Tabel Jumlah Dana Giro Komersial

(dalam jutaan Rupiah)

Giro Komersial	2023	2022	Kenaikan/Penurunan	
			Nominal	Persentase
Giro Non FLPP	75.362.849	62.039.774	13.323.075	21,48%
Giro FLPP	54.006.179	42.861.144	11.145.035	26,00%
Jumlah Dana Giro Komersial	129.369.028	104.900.918	24.468.110	23,32%

Jumlah dana Giro Komersial tahun 2023 sebesar Rp129,36 triliun, meningkat sebesar 23,32% dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar Rp104,90 triliun. Peningkatan tersebut

terutama disebabkan oleh naiknya Giro Non FLPP sebesar 21,48% dan Giro FLPP sebesar 26,00%.

Tabel Jumlah Rekening Giro Komersial

(dalam rekening)

Giro Komersial	2023	2022	Kenaikan/Penurunan	
			Nominal	Persentase
Giro Non FLPP	143.882	57.655	86.227	149,56%
Giro FLPP	9	8	1	12,50%
Jumlah Rekening Dana Giro Komersial	143.891	57.663	86.228	149,54%

Jumlah rekening Giro Komersial tahun 2023 sebanyak 143.891 rekening, meningkat 149,56% dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebanyak 57.663 rekening. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh pertumbuhan Giro Non FLPP sebesar 149,56%.

Deposito Berjangka Lembaga

Perseroan juga memberikan layanan penyimpanan dana dalam bentuk Deposito Berjangka Lembaga melalui produk Deposito Berjangka Lembaga dan Deposito *On Call* Lembaga.

Tabel Jumlah Dana Deposito Berjangka Lembaga

(dalam jutaan Rupiah)

Deposito Berjangka Lembaga	2023	2022	Kenaikan/Penurunan	
			Nominal	Persentase
Deposito Berjangka Lembaga	109.855.648	118.173.089	(8.317.441)	(7,04%)
Deposito <i>On Call</i> Lembaga	4.469.756	819.006	3.650.750	445,75%
Jumlah Dana Deposito Berjangka Lembaga	114.313.404	118.992.095	(4.678.691)	(3,92%)

Jumlah dana Deposito Berjangka Lembaga tahun 2023 sebesar Rp114,31 triliun atau turun sebesar 3,92% dibandingkan tahun 2022, yaitu sebesar Rp118,99 triliun. Penurunan tersebut dalam

rangka merekomposisi struktur dana lembaga dari Deposito ke Giro untuk menurunkan *Cost of Fund* (CoF).

Tabel Jumlah Rekening Deposito Berjangka Lembaga

(dalam rekening)

Deposito Berjangka Lembaga	2023	2022	Kenaikan/Penurunan	
			Nominal	Persentase
Deposito Berjangka Lembaga	10.674	9.027	1.647	18,25%
Deposito <i>On Call</i> Lembaga	207	74	133	179,73%
Jumlah Rekening Deposito Berjangka Lembaga	10.881	9.101	1.780	19,56%

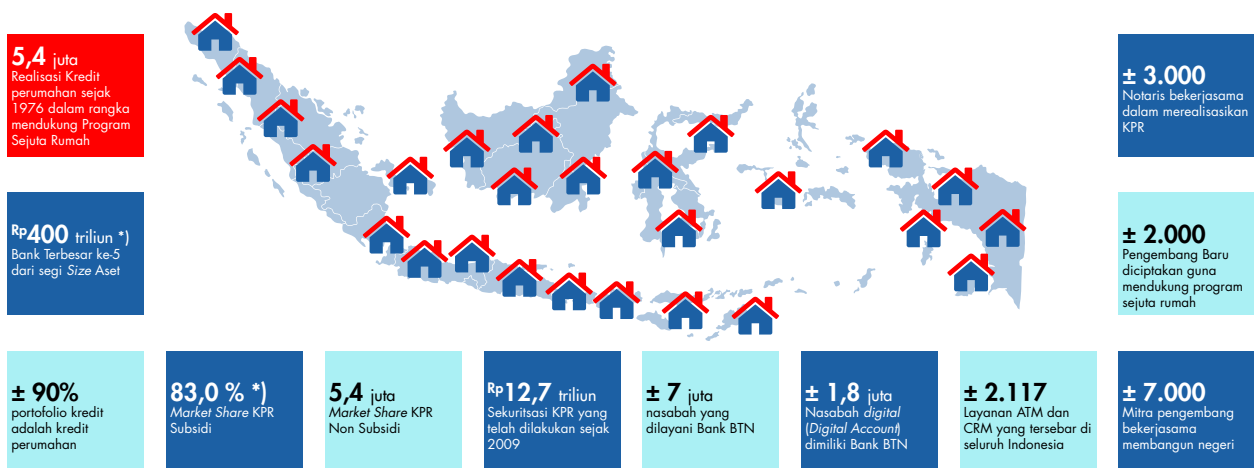
Jumlah rekening Deposito Berjangka Lembaga tahun 2023 sebanyak 10.881 rekening, meningkat 19,56% dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebanyak 9.101 rekening.

Peningkatan tersebut merupakan salah satu strategi diversifikasi nasabah untuk mengurangi ketergantungan dengan nasabah besar (*concentration risk*).

KEUNGGULAN KOMPETITIF DAN INOVASI SEGMENT KONVENSIONAL

Overview

Bank BTN menempati posisi sebagai Bank terbesar ke-5 dan memiliki *positioning* yang kuat pada bisnis perumahan



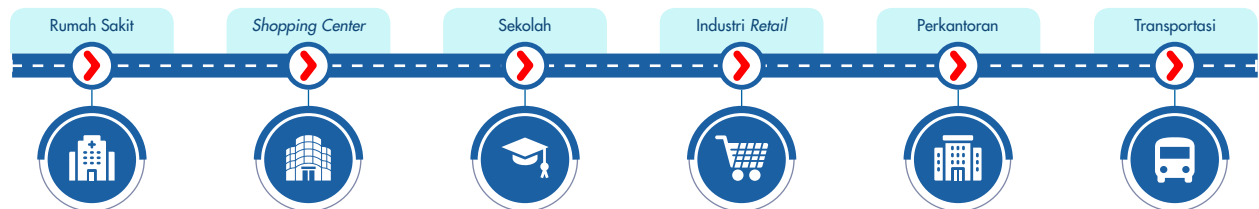
Sumber: Data Internal Bank BTN

Perseroan sebagai pemain utama di sektor perumahan sejak tahun 1976 telah merealisasikan 5,4 juta unit rumah dan menguasai 83% *market share* KPR Subsidi. Selain itu sebagai Bank Fokus Perumahan, Perseroan memiliki peranan penting sebagai *enabler* dan *integrator* dalam pengembangan ekosistem perumahan. Pada sisi *supply*, Perseroan memberikan kredit dan pembiayaan untuk penyediaan/

pembangunan rumah kepada lebih dari 7000 pengembang perumahan dan ikut serta dalam menciptakan 2000 pengembang baru. Pada sisi *demand*, Perseroan memberikan fasilitas KPR dan KPA kepada masyarakat yang memberikan kontribusi terhadap pembangunan Kawasan melalui pengembangan berbagai Fasilitas Umum (Fasum) dan Fasilitas Sosial (Fasos).

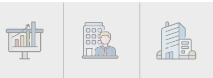


Sektor properti berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan PDB, diikuti dengan *multiplier effect* pada 174 sektor ekonomi turunannya.



Dampak Pembangunan Sektor Perumahan (dalam setiap 1 Rupiah input)





Sebagai sektor yang memiliki *multiplier effect* kepada 174 sub - sektor industri, pengembangan *value chain* dari bisnis perumahan juga menjadi salah satu strategi pengembangan bisnis yang akan dilakukan Perseroan. Untuk menangkap peluang tersebut, Perseroan akan mengembangkan produk dan layanan keuangan yang menyasar perluasan *value chain* bisnis konstruksi yaitu akuisisi lahan, bahan bangunan, pengembangan lahan dan properti, jasa konstruksi dan pembiayaan pada pengembang (*developer*).

Strategi Segmen Konvensional Tahun 2023

Langkah strategis yang ditempuh Perseroan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Penyempurnaan Model Operasional Cabang

Melakukan transformasi model operasional cabang yang berorientasi pada *sales* melalui sentralisasi fungsi operasional transaksi, kredit dan akunting. Sentralisasi aktivitas operasional akan dilakukan dalam beberapa tahap yaitu:

- Menjalankan program penjualan untuk meningkatkan produktivitas kantor cabang melalui peningkatan kapabilitas pegawai, monitoring kinerja secara real time, dan pembaharuan KPI.
- Meningkatkan fungsi BTN Smart melalui pengembangan BTN Smart fase 3.
- Mengembangkan program *marketing communication* melalui *umbrella campaign* pada seluruh *channel* Perseroan.

2. Mengembangkan Partnership

- Membentuk perusahaan modal ventura, sebagai special vehicle untuk mengembangkan perusahaan assets management dan penyertaan pada bisnis digital, seperti fintech KPR.
- Membentuk anak perusahaan asuransi jiwa untuk mengoptimalkan bisnis captive (KPR).
- Pendirian perusahaan Manajemen Investasi untuk mengelola dana TAPERA dan mengembangkan Dana Investasi *Real Estate* (DIRE)/*Real Estate Investment Trust* (REITS) dan Dana Investasi Infrastruktur (DINFRA).
- Mengembangkan platform jual-beli properti yang terintegrasi dengan BTN Properti.

3. Meningkatkan KPR Non Subsidi di Segmen Emerging Affluent dan Affluent

- Meluncurkan produk *bundling* KPR dengan Tabungan (BTN Solusi, KPR Tabungan).
- Digitalisasi proses KPR, melalui pengembangan tracking portal untuk nasabah dan pengembang.
- Mengembangkan proposisi KPR untuk segmen milenial, *mass*, dan *mass affluent*.
- Mengembangkan kerja sama dengan top developer yang menyasar proyek perumahan segmen *emerging affluent* dan *affluent*.
- Kerja sama dengan 15 agen properti nasional dan 6.000 agen properti individual untuk meningkatkan KPR Non Subsidi, khususnya KPR *second*.

- Memperbaharui *channel* BTN Properti dengan pengembangan kapabilitas pemasaran *digital* (SEO dan SEM), tampilan web (UI/UX), serta meningkatkan daftar pengembang.
- Membuat *one-stop-shop customer housing ecosystem* untuk produk/layanan di seluruh tahapan pada *customer life-cycle*.

4. Meningkatkan Kontribusi Pada Program KPR Subsidi dan Wholesale Funding

- Mengembangkan kerja sama kepemilikan rumah melalui program TAPERA.
- Mengembangkan pembangunan perumahan *Transit Oriented Development* (TOD) dengan bekerja sama dengan BUMN Karya dan pengembang lainnya.
- Kerja sama pendanaan untuk penyaluran KPR di segmen milenial dan urban.
- Kerja sama pendanaan untuk penyaluran KPR dari lembaga TAPERA, BPJS, atau Lembaga Pengelola Dana Pensiun lainnya.
- Mengembangkan potensi sumber pendanaan melalui dukungan Pemerintah ataupun regulator perbankan lainnya.

5. Mengembangkan Bisnis Berbasis Value Chain Perumahan

- Mengembangkan dan menjual produk pada sepanjang *value chain* mitra *developer* komersial.
- Menetapkan proses penjualan dan model cakupan *Relationship Manager* (RM) kredit komersial dan UMKM untuk memperoleh bisnis sepanjang *value chain* mitra *developer* komersial.
- Mengembangkan kemitraan di sepanjang ekosistem *real estate* untuk memberikan layanan *beyond-banking* kepada pengembang.

6. Mengembangkan Layanan Menjadi One Stop Solution Banking Service

- Mengembangkan BTN Solusi untuk meningkatkan product holding nasabah, menyasar korporasi BUMN, instansi pemerintah, instansi pendidikan dan perusahaan swasta besar.
- Mengembangkan layanan *premium banking* bagi segmen *emerging affluent* dan *affluent* dengan mengembangkan *digital* maupun *mobile banking*, memanfaatkan *data analytics*, dan meningkatkan kapabilitas Teknologi Informasi (TI) yang mendukung transaksional.
- Cross sell* kepada nasabah KPR melalui pemanfaatan *data analytics*.
- Menjadi bank operasional untuk nasabah institusi.
- Meningkatkan produktivitas transaksi *treasury* dan mengembangkan bank kustodian.

7. Mengembangkan Kapabilitas Channel Transaksi, Digitalisasi dan Data Analytics

- Mengembangkan *Application Programming Interface* (API) management dan sandboxing.
- Meningkatkan infrastruktur Teknologi Informasi (TI) dan fungsionalitas dari *Cash Management System* (CMS) dan *internet banking* untuk menyediakan produk CMS dan *internet banking* yang kompetitif bagi nasabah komersial.

- c. Mengembangkan strategi *digital banking* melalui pengembangan *mobile* dan *internet banking*, *virtual branch*, pembayaran *digital* dan pembukaan rekening *online*.
- d. Mengembangkan data analitik untuk mendukung kebutuhan bisnis serta penerapan tata kelola data dan mengembangkan infrastruktur *big data*.
- e. Integrasi *iLoan consumer*, *commercial*, *lead management system* dan *btnproperti.co.id*.

8. Meningkatkan Produktivitas Organisasi, Kapabilitas SDM dan Budaya Kerja

- a. Implementasi struktur organisasi berbasis Strategic Business Unit (SBU) untuk membangun *performance-driven organization*.
- b. Meningkatkan produktivitas pegawai melalui implementasi *reward management*, promosi *Employee Value Proposition* (EVP), perbaikan proses dan *channel* rekrutmen, serta pengembangan jalur karier.
- c. Meningkatkan pelatihan dan membangun kapabilitas *hard skill* dan *soft skill* pada unit kredit, RM, *sales force* di kantor cabang, maupun kepada fungsi support (IT, *operation*, *risk*, dan lainnya) dengan perencanaan pengembangan yang baik dan *tracking* kemajuan pembelajaran secara *digital*.

9. Melanjutkan Inisiatif Perbaikan Proses Bisnis

- a. Memperbaiki proses kredit komersial melalui simplifikasi dokumentasi, standarisasi dan otomatisasi alur kerja/proses kredit.
- b. Melakukan inisiatif perbaikan proses bisnis kredit SME melalui otomatisasi proses kredit, mengembangkan model *underwriting* kredit SME.
- c. Sentralisasi proses kredit komersial melalui pembentukan *Commercial Banking Center* (CBC).

10. Meningkatkan Kualitas Kredit Dan Mempercepat Penyelesaian NPL

- a. Memperkuat sistem manajemen *collection* dan meningkatkan produktivitas *desk collection* untuk segmen kredit konsumen.
- b. Standarisasi proses pengambilan keputusan restrukturisasi untuk SME dan komersial.
- c. Mempercepat penjualan kredit NPL melalui penjualan aset secara masif dengan menerapkan metode baru (penjualan aset kepada investor/institusi keuangan, kerja sama *debt recovery*, upaya litigasi dan *legal action*).

Prospek Usaha Dan Strategi Segmen Konvensional Tahun 2024

Prospek Jangka Pendek

Pada tahun 2023, kondisi ekonomi global sedikit tertahan sebagai dampak dari ketegangan politik Rusia dan Ukraina. Hal ini menyebabkan naiknya harga komoditas dan energi, yang menyebabkan inflasi yang mendorong Bank Sentral dari banyak negara menaikkan suku bunga acuannya untuk mengendalikan

inflasi di masing-masing negara. Menjelang akhir tahun 2023, kondisi ekonomi global menunjukkan perbaikan di mana inflasi dan suku bunga acuan di beberapa negara perlahan diturunkan. Namun, pada tahun 2024, ekonomi negara berkembang seperti Indonesia dan India diperkirakan akan tetap tumbuh melebihi capaian tahun 2023. Sedangkan ekonomi pada negara maju seperti Amerika Serikat dan Jepang diperkirakan akan tumbuh lebih lambat dibandingkan tahun 2023. Ekonomi Tiongkok pada tahun 2024 juga diperkirakan akan melambat. Pemulihan ekonomi global terus menunjukkan perbaikan dengan kecenderungan perlambatan ekonomi Tiongkok dan penguatan ekonomi Amerika Serikat. Tingkat inflasi di negara maju masih tetap tinggi karena berlanjutnya tekanan inflasi jasa, ketatnya pasar tenaga kerja, dan meningkatnya harga minyak. Perkembangan tersebut mendorong tetap tingginya suku bunga kebijakan moneter di negara maju, terutama Federal Funds Rate, yang mengakibatkan meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global. Proyeksi pertumbuhan ekonomi global oleh IMF untuk 2023 terkoreksi menjadi 3,0% dan sedikit menurun ke level 2,9% untuk tahun 2024.

Di Indonesia, pertumbuhan ekonomi domestik melanjutkan perbaikannya didukung oleh membaiknya permintaan domestik dan tetap positifnya kinerja ekspor seiring berlanjutnya hilirisasi sumber daya alam (SDA). Hal tersebut tercermin pada pertumbuhan positif keyakinan konsumen, penjualan eceran, ekspansi *Purchasing Managers' Index* (PMI) Manufaktur, serta realisasi ekspor yang tetap positif, yang didukung oleh meningkatnya mobilitas masyarakat dan penyaluran kredit oleh perbankan. Namun demikian, beberapa risiko perlu terus diwaspadai seperti tekanan inflasi global, kenaikan suku bunga acuan oleh The Fed, serta ketidakpastian pasar keuangan global. IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2023 sebesar 5,0%, sedikit tertahan akibat dampak perlambatan ekonomi global. Sementara pada 2024, perekonomian Indonesia diprediksi akan stabil tetap berada pada level 5,0%.

Prospek Jangka Menengah dan Panjang

Pertumbuhan ekonomi nasional yang terus berlanjut sampai dengan Triwulan III 2023 akan memberikan kontribusi positif terhadap potensi sektor properti ke depan, khususnya pada proyeksi pertumbuhan bisnis KPR. Selain pertumbuhan ekonomi, potensi peningkatan bisnis KPR ke depan juga akan di dorong oleh realisasi program KPR Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA) yang sudah dimulai sejak tahun 2022.

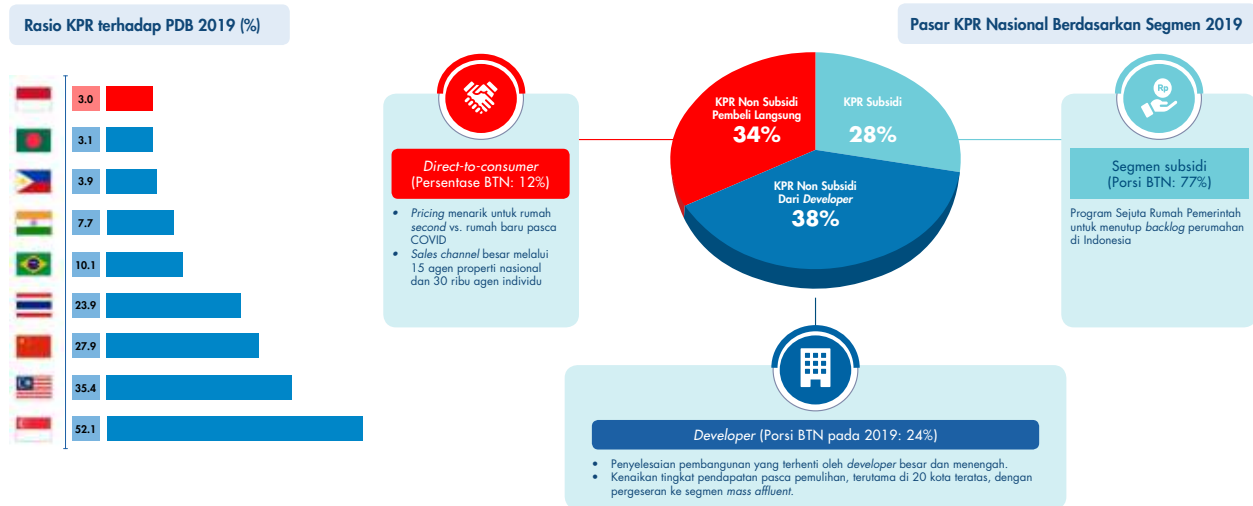
Rasio KPR terhadap PDB yang masih rendah juga merupakan peluang yang akan dikembangkan Perseroan untuk memperluas bisnis perumahan ke depannya. Di tahun 2019, rasio KPR terhadap PDB Indonesia adalah 3,0% masih lebih kecil dibanding negara Asia Tenggara lainnya seperti Filipina (3,9%), Thailand (23,9%) dan Singapura (52,1%). Dengan komitmen keberlanjutan Program Sejuta Rumah Pemerintah dan meningkatnya populasi *middle income* yang di dominasi oleh



generasi millennial dan segmen *emerging affluent* juga menjadi pertimbangan bagi Perseroan untuk memperluas fokusnya dalam mengembangkan bisnis perumahan ke depan, khususnya dalam meningkatkan pangsa pasar di segmen millennial dan *emerging affluent*. Untuk menangkap potensi pertumbuhan tersebut, di

tahun depan Perseroan akan meningkatkan penjualan KPR Non Subsidi dengan menyasar *top developers* dan *direct selling* KPR kepada konsumen (*direct to consumer*) melalui kerja sama dengan agen properti nasional dan individu.

Gambar Peluang Pengembangan Bisnis KPR

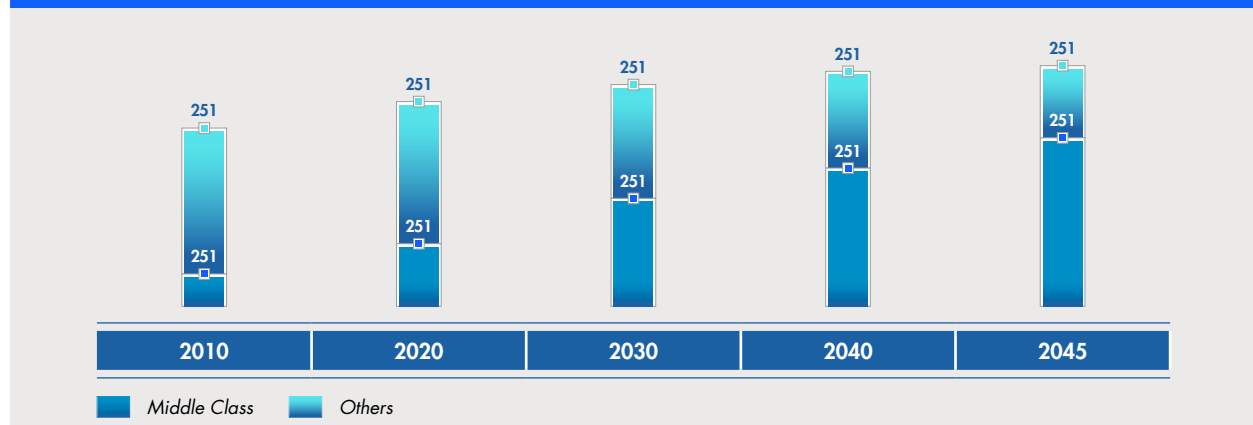


Bonus demografi dan pertumbuhan penduduk kelas menengah yang didominasi oleh generasi millennial juga menjadi pendorong bisnis pembiayaan perumahan ke depan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), saat ini jumlah generasi Z dan generasi millennial mendominasi populasi usia produktif dengan

generasi Z (usia 8 - 23 tahun) mencapai 27,94% dan generasi millennial (24 - 39) sebanyak 25,87% yang mana porsi tersebut diprediksi akan terus tumbuh hingga 10 tahun ke depan yang merupakan peluang untuk mengembangkan bisnis perumahan di segmen *first home buyer* yang menjadi *captive market* Perseroan.

Gambar Proyeksi Populasi Indonesia

(Juta Jiwa)

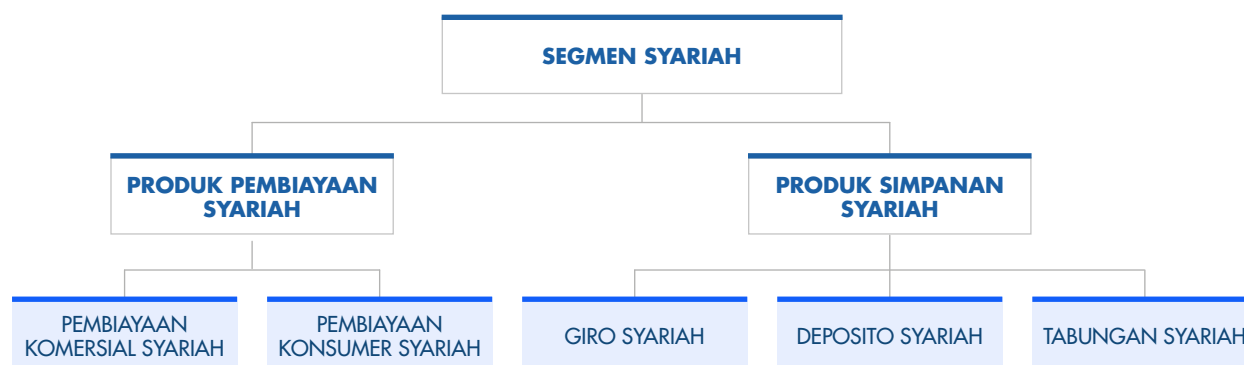


Segmen Syariah

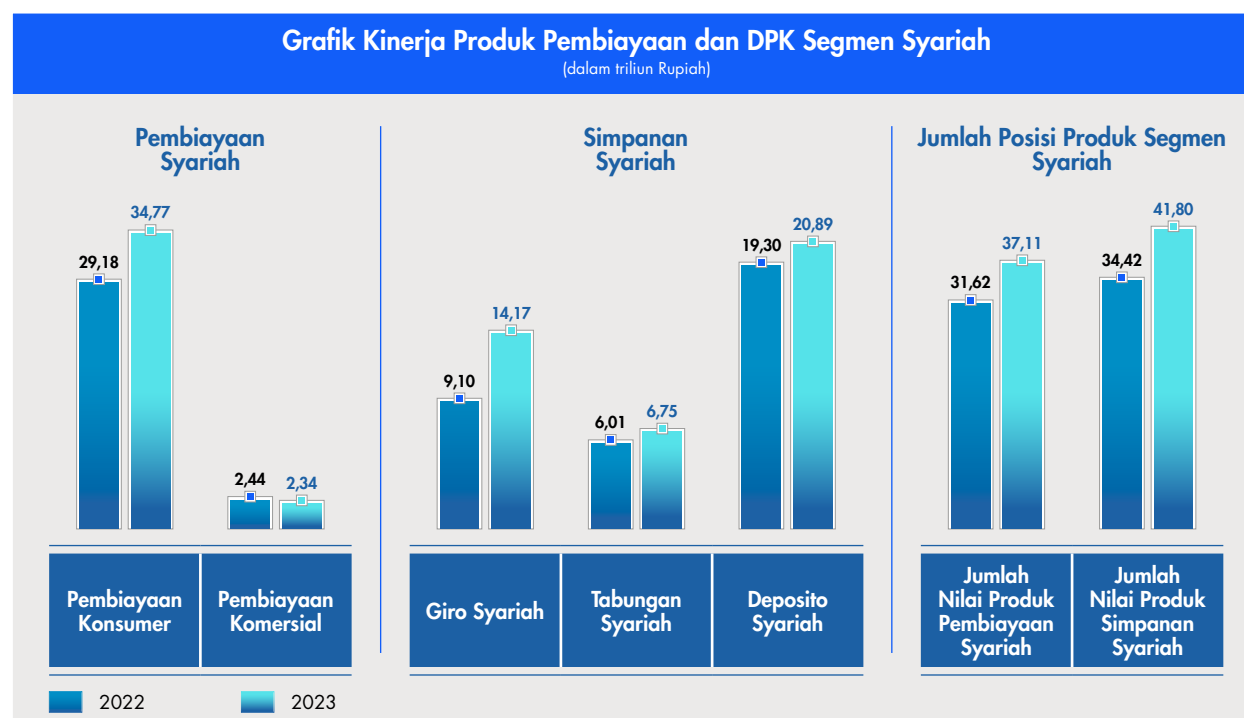
Penjelasan dan Produktivitas Segmen Syariah

Perseroan juga mengembangkan model perbankan dengan menganut sistem syariah. Segmen Usaha Syariah menyediakan produk simpanan dan pembiayaan bersifat konsumen dan

komersial. Kinerja produk dari Segmen Syariah diuraikan melalui 2 (dua) produk, yaitu Pembiayaan Syariah dan Simpanan Syariah, dengan masing - masing uraian sebagai berikut:



Sekilas tentang kinerja dari Segmen Syariah dapat dilihat pada tabel dan bagan berikut ini.



Produk Pembiayaan Syariah

Perseroan juga melakukan pembiayaan perumahan dan non perumahan melalui mekanisme syariah, dengan klasifikasi produk pembiayaan unit usaha syariah ke dalam jenis konsumen dan

komersial. Rincian informasi terkait kinerja produk Pembiayaan Syariah Perseroan dapat dilihat pada tabel dan di bawah ini.

Tabel Posisi Nilai Pembiayaan Syariah

(dalam jutaan Rupiah)

Pembiayaan Syariah	2023	2022	Kenaikan/Penurunan	
			Nominal	Persentase
Pembiayaan Konsumer	34.773.107	29.181.003	5.592.104	19,16%
Pembiayaan Komersial	2.341.174	2.443.136	(101.962)	(4,17%)
Jumlah Posisi Nilai Pembiayaan Syariah	37.114.281	31.624.139	5.490.142	17,36%

Jumlah posisi nilai penyaluran Pembiayaan Syariah tahun 2023 sebesar Rp37,11 triliun. Angka ini meningkat 17,36% dibanding penyaluran pembiayaan di tahun 2022. Peningkatan

tersebut disebabkan kenaikan kontribusi pertumbuhan dari pembiayaan konsumer sebesar Rp5,59 triliun yang meningkat sebesar 19,16% dibandingkan tahun 2022.

Tabel Posisi Volume Pembiayaan Syariah

(dalam unit pembiayaan)

Pembiayaan Syariah	2023	2022	Kenaikan/Penurunan	
			Nominal	Persentase
Pembiayaan Konsumer	276.508	241.407	35.101	14,54%
Pembiayaan Komersial	1.260	1.154	106	9,19%
Jumlah Posisi Volume Pembiayaan Syariah	277.768	242.561	35.207	14,51%

Pembiayaan Syariah yang berhasil disalurkan sampai dengan tahun 2023 sebanyak 277.768 unit pembiayaan. Dibanding dengan jumlah unit pembiayaan yang disalurkan sampai dengan tahun 2022, terjadi peningkatan sebanyak 35.207 unit, atau sekitar 14,51%. Peningkatan volume pembiayaan ini sebagian besar dikontibusi oleh kenaikan pembiayaan konsumer sebanyak 35.101 unit pembiayaan.

PEMBIAYAAN KONSUMER SYARIAH

Pembiayaan Konsumer Syariah disalurkan oleh Perseroan melalui beberapa produk sebagai berikut:

1. Pembiayaan Perumahan, meliputi:

- KPR Subsidi yang disalurkan melalui:
 - KPR BP2BT iB
 - KPR Sejahtera Tapak iB

- KPR Sejahtera Susun iB
- KPR SSM Tapak iB
- KPR SSM Susun iB
- KPR Tapera iB

b. KPR Non Subsidi yang disalurkan melalui:

- KPR Platinum iB
 - KPR Indent iB
- ##### c. Non KPR yang disalurkan melalui:
- Pembiayaan Bangun Rumah iB
 - PUM-KB Jamsostek iB

2. Pembiayaan Non Perumahan, meliputi:

- Pembiayaan Kendaraan Bermotor iB
- Pembiayaan Gadai iB
- Pembiayaan Multijasa iB
- Pembiayaan Multimanfaat iB
- Pembiayaan Emasku

Tabel Posisi Pembiayaan Konsumer Syariah

(dalam jutaan Rupiah)

Pembiayaan Konsumer Syariah	2023	2022	Kenaikan/Penurunan	
			Nominal	Persentase
PEMBIAYAAN PERUMAHAN	34.604.291	29.035.911	5.568.380	19,18%
KPR SUBSIDI	22.961.992	19.039.362	3.922.630	20,60%
KPR BP2BT iB	581.978	608.342	(26.364)	(4,33%)
KPR Sejahtera Tapak iB	14.313.911	9.806.680	4.507.231	45,96%
KPR Sejahtera Susun iB	1.440	149	1.291	866,44%
KPR SSM Tapak iB	7.715.628	8.450.095	(734.467)	(8,69%)
KPR SSM Susun iB	48.991	53.491	(4.500)	(8,41%)
KPR Tapera iB	300.044	120.605	179.439	148,78%
KPR Non Subsidi	11.604.082	9.948.479	1.655.603	16,64%
KPR Platinum iB	7.743.069	6.992.763	750.306	10,73%

Pembiayaan Konsumer Syariah	2023	2022	Kenaikan/Penurunan	
			Nominal	Persentase
KPR Indent iB	3.861.013	2.955.716	905.297	30,63%
Non KPR	38.217	48.070	(9.853)	(20,50%)
Pembiayaan Bangun Rumah iB	33.330	41.805	(8.475)	(20,27%)
PUM-KB Jamsostek iB	4.887	6.265	(1.378)	(22,00%)
PEMBIAYAAN NON PERUMAHAN	168.816	145.092	23.724	16,35%
Pembiayaan Kendaraan Bermotor iB	1.400	1.752	(352)	(20,09%)
Pembiayaan Gadai iB	-	141	(141)	(100,00%)
Pembiayaan Multijasa iB	15.940	10.346	5.594	54,07%
Pembiayaan Multimanfaat iB	151.476	132.803	18.673	14,06%
Pembiayaan Emasku	-	50	(50)	(100,00%)
Jumlah Posisi Pembiayaan Konsumer Syariah	34.773.107	29.181.003	5.592.104	19,16%

Jumlah posisi Pembiayaan Konsumer Syariah tahun 2023 adalah sebesar Rp34,77 triliun, meningkat 19,16% dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp29,18 triliun. Posisi pembiayaan

tersebut sebagian besar dikontribusi oleh pembiayaan KPR Sejahtera Tapak iB yang mencapai Rp14,31 triliun.

Tabel Posisi Volume Pembiayaan Konsumer Syariah

(dalam unit pembiayaan)

Pembiayaan Konsumer Syariah	2023	2022	Kenaikan/Penurunan	
			Nominal	Persentase
PEMBIAYAAN PERUMAHAN	273.261	238.414	34.847	14,62%
KPR SUBSIDI	221.749	189.853	31.896	16,80%
KPR BP2BT iB	6.213	6.263	(50)	(0,80%)
KPR Sejahtera Tapak iB	126.742	94.362	32.380	34,31%
KPR Sejahtera Susun iB	10	2	8	400,00%
KPR SSM Tapak iB	86.371	88.077	(1.706)	(1,94%)
KPR SSM Susun iB	313	314	(1)	(0,32%)
KPR Tapera iB	2.100	835	1.265	151,50%
KPR Non Subsidi	50.544	47.387	3.157	6,66%
KPR Platinum iB	38.119	37.051	1.068	2,88%
KPR Indent iB	12.425	10.336	2.089	20,21%
Non KPR	968	1.174	(206)	(17,55%)
Pembiayaan Bangun Rumah iB	348	438	(90)	(20,55%)
PUM-KB Jamsostek iB	620	736	(116)	(15,76%)
PEMBIAYAAN NON PERUMAHAN	3.247	2.993	254	8,49%
Pembiayaan Kendaraan Bermotor iB	15	17	(2)	(11,76%)
Pembiayaan Gadai iB	-	159	(159)	(100,00%)
Pembiayaan Multijasa iB	294	257	37	14,40%
Pembiayaan Multimanfaat iB	2.938	2.558	380	14,86%
Pembiayaan Emasku	-	2	(2)	(100,00%)
Jumlah Posisi Volume Pembiayaan Konsumer Syariah	276.508	241.407	35.101	14,54%

Posisi volume Pembiayaan Konsumer Syariah tahun 2023 sebanyak 276.508 unit pembiayaan, meningkat 14,54% dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebanyak 241.407 unit pembiayaan.

Peningkatan volume Pembiayaan Konsumer sebesar 35.101 unit yang disebabkan oleh kontribusi volume pembiayaan KPR Sejahtera Tapak iB sebanyak 32.380 unit pembiayaan.



PEMBIAYAAN KOMERSIAL SYARIAH

Pembiayaan Komersial Syariah disalurkan oleh Perseroan melalui beberapa produk sebagai berikut:

1. Pembiayaan Perumahan
 - a. Pembiayaan Konstruksi BTN iB
2. Pembiayaan Non Perumahan
 - a. UMKM Syariah
 - b. Pembiayaan Modal Kerja iB
 - c. Pembiayaan Investasi iB

Tabel Posisi Pembiayaan Komersial Syariah

(dalam jutaan Rupiah)

Pembiayaan Konsumer Syariah	2023	2022	Kenaikan/Penurunan	
			Nominal	Persentase
Pembiayaan Perumahan	1.982.368	1.776.454	205.914	11,59%
Pembiayaan Konstruksi BTN iB	1.982.367	1.776.454	205.914	11,59%
Pembiayaan Non Perumahan	358.807	666.682	(307.875)	(46,18%)
UMKM Syariah	0	-	-	(100,00%)
Pembiayaan Modal Kerja iB	280.771	524.110	(243.339)	(46,43%)
Pembiayaan Investasi iB	78.036	142.572	(64.536)	(45,27%)
Jumlah Posisi Nilai Pembiayaan Komersial Syariah	2.341.174	2.443.136	(101.962)	(4,17%)

Posisi Pembiayaan Komersial tahun 2023 mencapai Rp2,34 triliun. Pencapaian ini menurun sebesar Rp101,96 miliar atau 4,17% apabila dibandingkan dengan tahun 2022. Penurunan tersebut berasal dari Pembiayaan Modal Kerja BTN iB

dikarenakan adanya pelunasan nasabah-nasabah besar. Akan tetapi penurunan tersebut diimbangi dengan peningkatan posisi pembiayaan untuk produk Pembiayaan Konstruksi BTN iB sebesar Rp205,91 miliar.

Tabel Posisi Volume Pembiayaan Komersial Syariah

(dalam unit pembiayaan)

Pembiayaan Konsumer Syariah	2023	2022	Kenaikan/Penurunan	
			Nominal	Persentase
Pembiayaan Perumahan	1.161	996	165	16,57%
Pembiayaan Konstruksi BTN iB	1.161	996	165	16,57%
Pembiayaan Non Perumahan	99	158	(59)	(37,34%)
UMKM Syariah	-	-	-	-
Pembiayaan Modal Kerja iB	48	89	(41)	(46,07%)
Pembiayaan Investasi iB	51	69	(18)	(26,09%)
Jumlah Posisi Volume Pembiayaan Komersial Syariah	1.260	1.154	106	9,19%

Jumlah posisi volume Pembiayaan Komersial tahun 2023 sebanyak 1.260 unit, meningkat sebanyak 9,19% dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebanyak 1.154 unit. Peningkatan Posisi volume pembiayaan Komersial melalui produk Pembiayaan Konstruksi BTN iB yang menjadi fokus penyaluran Pembiayaan Komersial tahun 2023 sebesar 165 unit pembiayaan.

Produk Simpanan Syariah

Perseroan juga melakukan penghimpunan Dana Pihak Ketiga melalui Unit Usaha Syariah melalui produk Giro, Tabungan, dan Deposito Syariah.

Tabel Posisi Dana Simpanan Syariah

(dalam jutaan Rupiah)

Simpanan Syariah	2023	2022	Kenaikan/Penurunan	
			Nominal	Persentase
Giro Syariah	14.165.526	9.104.388	5.061.138	55,59%
Tabungan Syariah	6.749.835	6.012.830	737.005	12,26%
Deposito Syariah	20.887.524	19.523.557	1.363.967	6,99%
Jumlah Posisi Dana Simpanan Syariah	41.802.885	34.640.775	7.162.110	20,68%

Jumlah posisi dana Simpanan Syariah tahun 2023 adalah sebesar Rp41,80 triliun, meningkat 20,68% dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar Rp34,64 triliun. Peningkatan tersebut sebagian besar dipengaruhi oleh kenaikan nominal

Giro Syariah sebesar 55,59%. Tabungan Syariah dan Deposito Syariah juga mengalami peningkatan masing-masing sebesar 12,26% dan 6,99%.

Tabel Posisi Volume Rekening Simpanan Syariah

(dalam rekening)

Simpanan Syariah	2023	2022	Kenaikan/Penurunan	
			Nominal	Persentase
Giro Syariah	61.128	15.295	45.833	299,66%
Tabungan Syariah	1.191.847	1.063.346	128.501	12,08%
Deposito Syariah	10.957	11.261	(304)	(2,70%)
Jumlah Posisi Volume Rekening Simpanan Syariah	1.263.932	1.089.902	174.030	15,97%

Jumlah volume rekening simpanan syariah tahun 2023 tumbuh sebesar 15,97% dibanding 2022 menjadi sebanyak 1.263.932 rekening. Produk Giro Syariah dengan pertumbuhan volume sebesar 299,66% menjadi kontributor terbesar atas peningkatan volume simpanan syariah. Produk Tabungan Syariah juga mengalami peningkatan dari sisi volume rekening, yaitu sebanyak 128.501 rekening, 12,08% lebih tinggi dari tahun 2022. Deposito syariah menjadi satu-satunya produk simpanan syariah yang mengalami penurunan volume rekening di tahun

2023, yaitu sebesar 2,70%. Peningkatan volume rekening Giro Syariah dan Tabungan Syariah yang diiringi dengan penurunan volume rekening Deposito Syariah adalah salah satu hasil dari strategi peningkatan CASA dan DPK ritel.

GIRO SYARIAH

Simpanan Syariah dalam bentuk Giro diberikan melalui 2 (dua) produk, yaitu Giro BTN iB dan Giro BTN Prima iB.

Tabel Posisi Dana Giro Syariah

(dalam jutaan Rupiah)

Giro Syariah	2023	2022	Kenaikan/Penurunan	
			Nominal	Persentase
Giro BTN iB	13.439.465	8.623.601	4.815.864	55,85%
Giro BTN Prima iB	726.061	480.787	245.274	51,02%
Jumlah Posisi Dana Giro Syariah	14.165.526	9.104.388	5.061.138	55,59%

Jumlah posisi dana Giro Syariah tahun 2023 mengalami peningkatan 55,59% menjadi sebesar Rp14,17 triliun jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar Rp9,10 triliun. Kedua produk Giro Syariah sama-sama mengalami peningkatan

di atas 50% dibanding tahun 2022 dengan rincian Giro BTN iB mengalami peningkatan 55,85% menjadi Rp13,44 triliun dan Giro BTN Prima iB meningkat 51,02% menjadi Rp726 miliar.

Tabel Posisi Rekening Giro Syariah

(dalam rekening)

Giro Syariah	2023	2022	Kenaikan/Penurunan	
			Nominal	Persentase
Giro BTN iB	59.038	13.363	45.675	341,80%
Giro BTN Prima iB	2.090	1.932	158	8,18%
Jumlah Posisi Volume Rekening Giro Syariah	61.128	15.295	45.833	299,66%

Jumlah posisi rekening Giro Syariah tahun 2023 adalah sebanyak 61.128 rekening, angka ini meningkat sebanyak 45.833 rekening atau tumbuh 299,66% dibanding tahun 2022. Peningkatan

tersebut terutama dikontribusi oleh kenaikan Giro BTN iB. Dengan peningkatan 341,80% dibanding tahun 2022, Giro BTN iB menjadi produk giro yang peningkatannya sangat signifikan.



TABUNGAN SYARIAH

Simpanan Syariah dalam bentuk Tabungan diberikan melalui beberapa produk yaitu Tabungan BTN Batara iB, Tabungan BTN

Prima iB, Tabungan BTN Haji iB, TabunganKu iB, Tabungan BTN Qurban iB, Tabungan Simpel BTN iB dan Tabungan Emas BTN iB.

Tabel Posisi Dana Tabungan Syariah

(dalam jutaan Rupiah)

Tabungan Syariah	2023	2022	Kenaikan/Penurunan	
			Nominal	Persentase
Tabungan BTN Batara iB	1.256.572	1.178.529	78.043	6,62%
Tabungan BTN Prima iB	5.214.570	4.602.504	612.066	13,30%
Tabungan BTN Haji iB	245.314	205.866	39.448	19,16%
TabunganKu iB	13.532	10.451	3.081	29,48%
Tabungan BTN Qurban iB	6.092	4.736	1.356	28,63%
Tabungan Simpel BTN iB	6.489	4.738	1.751	36,96%
Tabungan Emas BTN iB	7.266	6.006	1.260	20,98%
Jumlah Posisi Dana Tabungan Syariah	6.749.835	6.012.830	737.005	12,26%

Jumlah posisi dana Tabungan Syariah tahun 2023 mengalami peningkatan 12,26% yakni menjadi sebesar Rp6,75 triliun jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar Rp6,01 triliun. Kontribusi terbesar pada peningkatan dana Tabungan Syariah adalah Tabungan BTN Prima iB yang meningkat sebesar Rp612,07 miliar. Tabungan BTN Prima iB merupakan tabungan dengan

akad *mudharabah* (investasi) yang memberikan bagi hasil yang menguntungkan kepada nasabah. Peningkatan tabungan BTN Prima iB juga menunjukkan bahwa kinerja UUS Perseroan pada tahun 2023 semakin membaik dan dapat memberikan bagi hasil yang optimal kepada nasabah sehingga membuat nasabah mempercayakan penempatan dana lebih banyak kepada UUS Perseroan.

Tabel Posisi Volume Rekening Tabungan Syariah

(dalam rekening)

Tabungan Syariah	2023	2022	Kenaikan/Penurunan	
			Nominal	Persentase
Tabungan BTN Batara iB	701.304	632.423	68.881	10,89%
Tabungan BTN Prima iB	153.644	146.374	7.270	4,97%
Tabungan BTN Haji iB	194.333	170.071	24.262	14,27%
TabunganKu iB	26.108	20.025	6.083	30,38%
Tabungan BTN Qurban iB	23.187	14.867	8.320	55,96%
Tabungan Simpel BTN iB	82.873	71.363	11.510	16,13%
Tabungan Emas BTN iB	10.398	8.223	2.175	26,45%
Jumlah Posisi Volume Rekening Tabungan Syariah	1.191.847	1.063.346	128.501	12,08%

Jumlah posisi volume rekening Tabungan Syariah tahun 2023 adalah sebanyak 1,19 juta rekening, meningkat 12,08 % jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebanyak 1,06 juta rekening. Kontribusi terbesar pada peningkatan jumlah rekening

Tabungan Syariah adalah Tabungan BTN Batara iB yang meningkat sebanyak 68,88 ribu rekening. Peningkatan tersebut antara lain disebabkan oleh adanya kerjasama dengan institusi pemerintah untuk penyaluran program.

DEPOSITO SYARIAH

Simpanan Syariah dalam bentuk Deposito diberikan melalui 2 (dua) produk, yaitu Deposito BTN iB baik untuk perorangan maupun untuk lembaga, serta Deposito *On Call* iB.

Tabel Posisi Dana Deposito Syariah

(dalam jutaan Rupiah)

Deposito Syariah	2023	2022	Kenaikan/Penurunan	
			Nominal	Persentase
Deposito BTN iB (Perorangan)	1.312.892	1.121.365	191.527	17,08%
Deposito BTN iB (Lembaga)	18.695.037	18.153.922	541.115	2,98%
Deposito <i>On Call</i> iB	879.595	24.827	854.768	3.442,90%
Jumlah Posisi Dana Deposito Syariah	20.887.524	19.523.557	1.363.967	6,99%

Jumlah posisi dana Deposito Syariah tahun 2023 sebesar Rp20,89 triliun, meningkat 6,99% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar Rp19,52 triliun. Jumlah posisi Deposito BTN iB Perorangan, Deposito BTN iB Lembaga, dan Deposito *On*

Call iB masing-masing meningkat sebesar 17,08%, 2,98%, dan 3.442,90%. Peningkatan posisi nilai deposito ini dikontribusikan oleh antara lain oleh program khusus yang diberikan kepada deposan seperti spesial nisbah.

Tabel Posisi Volume Rekening Deposito Syariah

(dalam rekening)

Deposito Syariah	2023	2022	Kenaikan/Penurunan	
			Nominal	Persentase
Deposito BTN iB (Perorangan)	9.240	9.319	(79)	(0,85%)
Deposito BTN iB (Lembaga)	1.662	1.901	(239)	(12,57%)
Deposito <i>On Call</i> iB	55	41	14	34,15%
Jumlah Posisi Volume Rekening Deposito Syariah	10.957	11.261	(304)	(2,70%)

Jumlah posisi volume rekening Deposito Syariah tahun 2023 sebanyak 10.957 rekening, lebih rendah 2,70% dibanding tahun 2022 yang sebanyak 11.209 rekening. Meskipun terjadi penurunan volume rekening deposito, namun jika dilihat dari besarnya nilai posisi deposito tetap mengalami peningkatan pada tahun 2023.

Keunggulan Kompetitif dan Inovasi Segmen Syariah

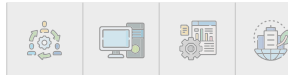
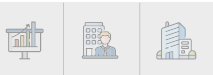
Beberapa keunggulan kompetitif maupun inovasi yang dilakukan oleh Segmen Syariah antara lain diuraikan sebagai berikut:

1. Peluang nasabah *captive* dengan KPR, Pembiayaan Konstruksi dan Dana Lembaga yang berpotensi dikembangkan.
2. Menjadi mitra Pemerintah pada Program Perumahan Nasional.

3. Kondisi *excess reserve* yang cukup tinggi.
4. Inisiatif transformasi (*Financing Origination System/ FOS Collection*, kerjasama Tapera dan Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (TWP AD), *digital onboarding*, dan *corebanking system upgrade*).
5. Pengembangan produk *rent to own* syariah

Strategi Segmen Syariah Tahun 2023

Strategi segmen syariah tahun 2023 meliputi strategi pengembangan bisnis pembiayaan, strategi pengembangan pendanaan, strategi permodalan, strategi perbaikan kualitas pembiayaan, strategi *fee based income*, strategi infrastruktur *Information Technology* (IT) yang diuraikan sebagai berikut



a. Strategi Pengembangan Bisnis Pembiayaan

Tema Strategi	Inisiatif
1. Meningkatkan <i>marketshare</i> penyaluran KPR Subsidi yang berkualitas.	a. Mengoptimalkan porsi Bank BTN pada kuota KPR FLPP dan KPR TAPERA tahun 2023 yang menyasar segmen <i>fixed income</i> dan ASN. b. Memperkuat komunikasi dengan <i>stakeholder</i> perumahan dalam penyusunan program. c. Sosialisasi dan edukasi KPR FLPP dan KPR TAPERA ke asosiasi pengembang. d. Pengembangan <i>host to host</i> untuk penyaluran KPR FLPP dan KPR Tapera. e. Pemberian <i>reward</i> dan insentif untuk pengembang. f. Pengembangan H2H dengan mitra asuransi untuk automasi penutupan asuransi. g. Pengembangan PRR TAPERA Syariah dan PBR TAPERA Syariah untuk memenuhi kebutuhan nasabah segmen ASN. h. Memperkuat sinergi kerjasama dengan pengembang subsidi <i>rating</i> tertentu.
2. Optimalisasi realisasi KPR/KPA dari <i>top developer</i> dan kerjasama dengan agen properti.	a. Pemberian <i>fee marketing</i> khusus dan <i>reward</i>. b. <i>Gathering</i> secara rutin/berkala. c. Sinergi dan join promo dengan asosiasi dan pengembang. d. Optimalisasi dan penyempurnaan portal BTN Properti dalam membantu penjualan pengembang. e. Pengembangan aplikasi <i>Lead Management System</i> untuk memudahkan <i>monitoring</i> kegiatan pemasaran.
3. Menumbuhkan database <i>Business Ecosystem</i> untuk meningkatkan penyaluran pembiayaan Non KPR.	a. Meningkatkan kerjasama/kemitraan dengan pihak ketiga. b. Telemarketing nasabah KPR eksisting melalui <i>program top up</i> pembiayaan. c. Penawaran multijasa dan multimanfaat ke seluruh pegawai Bank BTN dan pegawai perusahaan <i>payroll</i>.
4. Optimalisasi <i>platform digital</i> yang sudah ada dalam mendukung pemasaran dan realisasi KPR bersubsidi maupun KPR Non Subsidi.	a. Optimalisasi penggunaan portal BTN Properti dengan bekerjasama dengan pengembang. b. Membuat <i>gimmick</i> dan program promosi untuk nasabah yang mengajukan permohonan KPR melalui BTN Properti. c. Implementasi FOS Konsumer dan <i>upgrade</i> aplikasi Eloan dalam upaya percepatan proses pembiayaan.
5. Peningkatan portofolio pembiayaan komersil serta mengembangkan skema pembiayaan baru sepanjang <i>value chain</i> perumahan kepada segmen UMKM, <i>corporate</i> dan instansi.	a. <i>Maintenance</i> secara berkelanjutan pengembang eksisting b. Melakukan diversifikasi portofolio pembiayaan komersil secara selektif kepada BUMN, Group Usaha Swasta <i>Bonafide</i> dan institusi pendidikan. c. Optimalisasi <i>partnership</i> dengan program <i>restricted investment</i> (SRIA). d. Diversifikasi produk melalui produk <i>supply chain financing</i> kepada nasabah UMKM, korporasi, dan instansi.
6. Memperluas Pembiayaan Syariah dengan mengembangkan solusi pembiayaan inovatif.	a. Memperluas proposisi nilai syariah dengan memanfaatkan solusi pembiayaan inovatif (misal: <i>Ijarah</i> untuk <i>developer</i>). b. Memperluas cakupan akad MMQ dari total buku pembiayaan Syariah (10%). c. Diversifikasi skema KPR dengan menggunakan akad IMBT

b. Strategi Pengembangan Pendanaan

Tema Strategi	Inisiatif
1. <i>Reengineering</i> model pemasaran DPK yang efektif dan <i>rebranding</i> produk.	a. Menyusun <i>marketing communication</i> dan <i>rebranding</i> yang efektif dan terintegrasi melalui <i>umbrella campaign</i>. b. Promo <i>merchant</i> dan <i>partnership</i> yang dapat menjangkau seluruh Indonesia. c. Pengadaan <i>event</i> yang secara langsung berdampak pada pencapaian bisnis melalui aktivitas terpadu.
2. Peningkatan DPK berbiaya murah.	a. Peningkatan aktivitas transaksi tabungan lembaga melalui pemberian program khusus. b. <i>Bundling product</i> pembiayaan KPR dengan tabungan sekunder. c. Fokus KPI Kantor Cabang Syariah pada peningkatan CASA dan DPK Ritel. d. Meningkatkan komposisi tabungan ritel melalui kolaborasi intensifikasi potensi nasabah perorangan pada lembaga yang telah bekerjasama.
3. Menjadi bank operasional nasabah institusi.	a. Fokus pengembangan produk giro kepada kementerian untuk akuisisi Satuan Kerja (<i>satker</i>) dan rekanannya. b. Meningkatkan akuisisi nasabah BUMN, anak perusahaan BUMN, dan swasta. c. Peningkatan kerja sama transaksional lembaga melalui <i>Cash Management System</i> (CMS). d. Fokus penjualan pada segmentasi nasabah Pemerintah, <i>Satker</i> Kementerian/Lembaga dan Badan Layanan Umum.
4. Upaya Peningkatan CASA melalui utilisasi <i>e-channel</i> untuk mendukung transaksional.	a. Meningkatkan CASA dengan pengembangan <i>digital banking</i> serta fitur <i>e-banking</i> b. Meningkatkan transaksi pada nasabah eksisting yang menyasar nasabah <i>captive</i>. c. Optimalisasi layanan pembukaan rekening secara <i>online</i> dalam pembukaan rekening tabungan. d. <i>Utilisasi e-channel</i> (<i>New Mobile Banking</i>, CMS, <i>New Virtual Account</i>) untuk mendorong giro dan tabungan transaksional.

Tema Strategi	Inisiatif
5. Pengembangan produk DPK untuk peningkatan penghimpunan dana nasabah.	a. Pengembangan Tabungan Emas dengan pemberian layanan penyediaan emas melalui jasa pihak ketiga. b. Pengembangan Tabungan tapera berbasis skema <i>saving plan</i> untuk kepesertaan TAPERA.

c. Strategi Permodalan

Untuk mendukung penyaluran strategi pengembangan bisnis, dibutuhkan permodalan yang cukup dengan mempertimbangkan pemenuhan kewajiban modal minimum sesuai Basel III. Upaya penguatan permodalan tahun 2023 akan difokuskan pada:

- Peningkatan laba/profitabilitas.
- Penerbitan Sukuk Tapera sebagai salah satu bentuk pendanaan jangka panjang likuiditas UUS Bank BTN.
- Mengoptimalkan penambahan modal dari pelaksanaan *right issue* oleh BTN Induk di tahun 2022.

d. Strategi Perbaikan Kualitas Pembiayaan

Tema Strategi	Inisiatif
1. Memperkuat <i>Collection Management System</i> .	a. Memperkuat <i>collection management system</i> - segmen konsumen. b. Memperkuat <i>collection management system</i> - segmen komersial. c. Percepatan penyelesaian dokumen pokok dan <i>monitoring</i> untuk percepatan litigasi. d. Memperbaiki Kualitas data nasabah. e. <i>Piloting</i> perubahan proses bisnis <i>collection</i> di Kantor Cabang. f. Implementasi FOS <i>Collection</i> - segmen konsumen
2. Membenahi Tenaga Alih Daya (TAD) <i>management</i> .	a. Evaluasi kinerja vendor TAD <i>collection</i> . b. <i>Monitoring</i> produktivitas TAD <i>collection</i> .
3. Mempercepat penjualan aset pembiayaan macet.	a. Penjualan aset pembiayaan macet secara <i>bulk</i> . b. Memperluas <i>channel</i> penjualan pembiayaan macet. c. <i>Project assets sales</i> untuk mempercepat <i>recovery</i> pembiayaan macet.
4. Perbaikan kualitas pembiayaan komersial secara masif.	a. Penginian data pembiayaan komersial NPF dan pasif. b. Pengklasifikasian loan NPF dan pasif menjadi 4 (empat) kuadran c. Partisipasi dalam program BTN <i>Project Tiger</i> . d. <i>Coaching</i> dan <i>mentoring</i> kepada pegawai Kantor Cabang.
5. Memperluas jaringan terhadap pihak ketiga dalam upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah.	Pendekatan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan Pengadilan Agama serta memperluas kerja sama dengan agen properti, BLS, advokat, asosiasi pengembang, dan kontraktor.
6. Memperluas relaksasi kebijakan dan pemberian <i>reward</i> .	Pemberian kebijakan untuk memperlancar proses penyelesaian pembiayaan serta pemberian <i>reward</i> dan bantuan operasional.

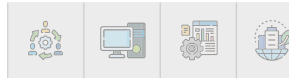
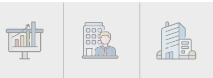
e. Strategi Fee Based Income

Tema Strategi	Inisiatif
1. Meningkatkan pendapatan administrasi Bank.	a. Meningkatkan kontribusi biaya administrasi pembiayaan. b. Optimalisasi pembebanan biaya administrasi Dana pihak ketiga.
2. Meningkatkan pendapatan fee/ujroh jasa bank.	c. Optimalisasi <i>fee/ujroh</i> atas <i>bancassurance</i> . d. Meningkatkan <i>fee/ujroh</i> atas transaksi <i>payroll</i> . e. Optimalisasi <i>fee/ujroh</i> atas jasa perbankan lainnya
3. Meningkatkan <i>fee</i> berbasis transaksi.	a. Peningkatan pengguna <i>e-channel</i> (<i>Mobile Banking</i> , CMS, VA, SMS Notif, ATM). b. Pengembangan dan peningkatan fitur <i>e-channel</i> . c. Peningkatan kerjasama <i>partnership</i> berbasis <i>Virtual Account</i> (VA).

f. Strategi Infrastruktur Teknologi Informasi (TI)

Pengembangan Teknologi Informasi (TI) pada UUS Perseroan di tahun 2023 dilakukan oleh BTN Induk dalam rangka mendukung rencana korporasi serta aspirasi Kebijakan Umum Direksi tahun 2023 pada bidang kredit/pembiayaan dan kualitas kredit/pembiayaan, bidang pendanaan dan jaringan kantor, bidang *fee based income*, dan bidang beban *overhead*.

Tema tahunan yang diusung pada strategi Teknologi Informasi (TI) pada tahun 2023 adalah *Expand the Transformation*, Perseroan melanjutkan eksekusi *upgrade/replace* dan atau *enhancement* terhadap sistem - sistem kritikal yang telah diidentifikasi, melanjutkan pengembangan *system agile based* (seperti *digital*



channel). Adapun rencana pengembangan Teknologi Informasi (TI) 2023 secara garis besar selaras dengan inisiatif utama RSTI 2021 - 2025 adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan strategi *digital banking* dengan perencanaan dan pembaharuan melalui:
 - a. Modernisasi *digital channel* melalui pengembangan *new mobile banking*, EKYC untuk *Online Onboarding for Open Account* UUS Perseroan dan *Virtual Account*.
 - b. Pengembangan ekosistem *digital* dan *partnership*.
2. Otomatisasi proses bisnis dan peningkatan kualitas layanan Teknologi Informasi (TI), melalui modernisasi *hardware*, *software/sistem*, infrastruktur maupun implementasi *high availability* pada perangkat *network data center*, dan penggunaan infrastruktur *cloud*.
3. Mengembangkan dan optimalisasi sistem operasional komputer Syariah NG untuk mendukung bisnis syariah dengan *upgrade core banking system* syariah, pembaharuan *mobile banking* syariah serta *upgrading* beberapa server sistem demi mendukung operasional bank yang lebih baik dan andal.
4. Melakukan *assessment* untuk meningkatkan *security maturity level* dalam mempersiapkan organisasi Teknologi Informasi (TI) *Security* yang handal berbasis implementasi CISO serta peningkatan kapabilitas *security*.
5. Penyesuaian dan penguatan kebijakan Teknologi Informasi (TI) terhadap kebijakan dan prosedur regulator dan internal bank, seperti penambahan prosedur pengembangan *rapid/agile* dan *devsecops* dan serta pemanfaatan *cloud*.
6. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas Tim Teknologi Informasi (TI) Perseroan melalui pelatihan dan sertifikasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
7. Melakukan pengembangan perluasan *monitoring* pada jaringan yaitu *Packet Analyzer* dan *Application Performance* untuk meningkatkan keandalan pada jaringan komunikasi.
8. Melakukan pengembangan *Application Performance Monitoring* untuk meningkatkan performa pada aplikasi.
9. Pengembangan *Loan Management System* Syariah berupa FOS - *enhancement* MMQ, fitur FOS *Consumer* dan FOS *Collection*.
10. *Enhancement* Deposito dan *Tools Monitoring* CIF.
11. Peningkatan Pinpad.
12. Meningkatkan kapabilitas sistem pembayaran seperti pengembangan sistem *fast payment* (BI - Fast Tahap 2) maupun sistem untuk mendukung bisnis *remittance*, seperti *host to host incoming transfer*.
13. Pengembangan Teknologi Informasi (TI) terkait *security by design* seperti implementasi *Identity and Access Management*, *Security*, *Network Monitoring* and *Compliance* dengan menerapkan *end point protection*, implementasi solusi pengamanan *cyber threat*, *integrated patch management*. Untuk mengetahui tingkat maturitas keamanan informasi, Perseroan juga

akan melakukan *assessment* maturitas keamanan siber. Selain itu, Perseroan juga akan melakukan pengujian keamanan siber berdasarkan analisis kerentanan dan skenario untuk meningkatkan ketahanan siber.

Prospek Usaha dan Strategi Segmen Syariah Tahun 2024

Pada tahun 2024, segmen syariah Perseroan ke depan memiliki prospek usaha yang baik. Segmen syariah melakukan inisiatif dalam mengembangkan bisnis pembiayaan pada jangka pendek dan menengah yaitu sebagai berikut:

1. **Mengembangkan program kepemilikan hunian yang terjangkau untuk mendukung program perumahan nasional.**
 - a. Mengoptimalkan porsi UUS Perseroan pada kuota KPR Subsidi FLPP dan TAPERA.
 - b. Mengembangkan skema KPR *Rent to Own* sebagai skema KPR yang *affordable* dan *equitable*, yang menyasar generasi millennial.
 - c. Kemitraan untuk pendanaan proyek perumahan segmen millennial dan urban.
 - d. Mengembangkan skema pendanaan untuk penyediaan perumahan yang terjangkau.
 - e. Pembangunan proyek perumahan millennial dengan harga terjangkau dan memiliki fasilitas lengkap (*working space*, *walkable/dekat ke mana - mana*) melalui pembangunan *Transit Oriented Development* (TOD).
 - f. Diversifikasi portofolio pembiayaan KPR dengan menggunakan skema akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT).
2. **Mengembangkan pangsa pasar KPR di segmen *emerging affluent* dan *affluent*.**
 - a. Meningkatkan kerjasama dengan *Top Developer* (skala nasional/gold/platinum) dan *Agent Property* skala nasional maupun lokal untuk menyasar pasar *primary* dan *secondary mortgage*.
 - b. Mengembangkan kerja sama dengan *developer* untuk mengembangkan proyek perumahan di segmen *emerging affluent*.
 - c. Memperkuat aplikasi dan portal BTN Properti dengan digitalisasi proses KPR secara *end to end*, baik untuk nasabah maupun pengembang.
 - d. Evaluasi *performance* pengembang dengan melakukan *rating* secara berkala sehingga dapat diberikan *Gimmick* khusus terhadap pengembang dengan *performance* baik.
 - e. Optimalisasi kerjasama dengan pengembang dengan penawaran kepada nasabah prima dan mitra kerjasama Perseroan.
 - f. Program *upselling* dan *cross selling* produk non subsidi kepada nasabah KPR Subsidi yang telah atau hampir lunas melalui kapabilitas *analytics* dan program *upselling*.

- g. Intensifikasi pembiayaan bermargin tinggi, memanfaatkan *database* nasabah *existing*

3. Memperluas *value chain real estate* yang menyoar UMKM dan Kontraktor.

- a. Penawaran produk pembiayaan *supply chain financing* kepada pelaku usaha di dalam rantai pasokan (*supply chain*).
- b. Memaksimalkan pemberian pembiayaan modal kerja ke nasabah kontraktor dalam pengerjaan konstruksi nasabah Pembiayaan Konstruksi.
- c. Membuat *one - stop - shop ekosistem* perumahan untuk di *life - cycle* nasabah

4. Perluasan skema produk pembiayaan di segmen KPR dan Non KPR.

- a. Diversifikasi portofolio pembiayaan KPR dengan menggunakan skema akad IMBT.
- b. Perluasan skema produk multimanfaat melalui fasilitas pembiayaan *refinancing* atas aset selain properti dengan akad Musyarakah Mutanaqisah (MMQ).

Untuk mencapai target tersebut, inisiatif strategis yang dilakukan pada jangka pendek dan menengah adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan kapabilitas sebagai bank transaksional dan *channel* transaksi.

- a. Mengoptimalkan produktivitas jaringan kantor yang berada di *target market area* (perkantoran, pertokoan dan pusat perbelanjaan).
- b. Meningkatkan produktivitas *sales* melalui pengembangan BTN Smart.
- c. Program dan strategi *campaign* tabungan melalui aktivitas *marketing communication* yang terintegrasi pada segmen menengah dan nasabah KPR Non Subsidi.
- d. Program akuisisi dan penjualan produk *bundling* kepada korporasi BUMN, Lembaga Pendidikan Islami dan Institusi Lainnya.
- e. Program peningkatan penggunaan transaksi *echannel* oleh nasabah KPR.

2. Menjadi bank operasional pengelolaan dana institusi.

- a. Meningkatkan akuisisi Satuan Kerja (Satker) Pemerintah dan interkoneksi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN).
- b. Meningkatkan akuisisi dan utilisasi *cash management* pada nasabah lembaga dan korporasi.
- c. Mengembangkan *customer base* melalui pendekatan ekosistem bisnis halal yang berfokus pada sektor *property related, healthcare, perdagangan, education* dan kawasan industri.
- d. Mengembangkan *retail and wholesale transaction* melalui program akuisisi dan aktivasi *mobile banking*, kartu debit, EDC, QRIS serta *cash management*.

3. Strategi peningkatan dana CASA.

- a. Intensifikasi tabungan pada nasabah pembiayaan eksisting dan lembaga yang bekerjasama.

- b. Meningkatkan produktivitas *sales* melalui pengembangan BTN Smart Versi 3.
- c. Meningkatkan *brand awareness* Perseroan UUS melalui program *marketing communications*.
- d. Meningkatkan tingkat *transactional banking* melalui pengembangan fitur dan layanan *e-channel, payment gateway* serta kerjasama dengan perusahaan *fintech* untuk pelayanan transaksi *digital*.
- e. Optimalisasi layanan perbankan *digital* melalui pembukaan rekening nasabah secara *online* tanpa nasabah perlu datang ke *outlet*.
- f. Meningkatkan peranan Kantor Layanan Syariah (KLS) dalam layanan pendaftaran haji serta penjualan produk Tabungan Haji dan Umroh.
- g. Peningkatan dana CASA melalui aktivitas *marketing* antara lain *investor gathering, property expo* dan *individual engagement*.
- h. Peningkatan pelayanan kepada nasabah tertentu melalui pemberian pelayanan perhatian khusus dan fasilitas eksklusif kepada segmentasi nasabah prima.
- i. Meningkatkan jumlah penabung melalui produk tabungan berbasis skema *saving plan* Tapera.

4. Meningkatkan dana institusi dan lembaga.

- a. Peningkatan fitur rekening *Virtual Account* (VA) untuk rekening kementerian negara/lembaga.
- b. Pengembangan *transactional Banking Commercial* (*Enhancement VA, Bulk Payment dan Payroll*)
- c. Peningkatan Kerjasama dengan Lembaga Pendidikan, Lembaga Islam, Pengembang, Kementerian Negara/Lembaga Pemerintah untuk pemenuhan kebutuhan pengelolaan dana lembaga serta layanan transaksional dan investasi.
- d. Peningkatan kerjasama pembayaran dan optimalisasi dana zakat, infaq, sedekah dan wakaf secara *digital* dengan lembaga filantropi.

5. Rekomposisi portofolio pendanaan.

- a. Peningkatan *Volume of Account* (VoA) dan *Number of Account* (NoA) Tabungan BTN Haji dan Umroh BTN iB dengan menjalin kemitraan dengan mitra institusi strategis antara lain Kementerian Agama, BPKH, Tour and Travel Umroh, Ormas Keislaman, Kampus - Kampus Islam, Majelis Taklim, dan sebagainya.
- b. Rekomposisi portofolio deposito dengan meningkatkan *share* kontribusi dari deposito ritel.
- c. Meningkatkan tingkat *transactional banking* melalui pengembangan fitur dan layanan *echannel, payment gateway* serta kerjasama dengan perusahaan *fintech* untuk pelayanan transaksi *digital*.
- d. Optimalisasi layanan perbankan *digital* melalui pembukaan rekening nasabah secara *online* tanpa nasabah perlu datang ke *outlet*.
- e. Meningkatkan peranan Kantor Layanan Syariah (KLS) dalam layanan pendaftaran haji serta penjualan produk Tabungan Haji dan Umroh.

- f. Peningkatan dana CASA melalui aktivitas *marketing* antara lain *investor gathering*, *property expo* dan *individual engagement*.
- g. Peningkatan pelayanan kepada nasabah tertentu melalui pemberian pelayanan perhatian khusus dan fasilitas eksklusif kepada segmentasi nasabah prima.

- h. Meningkatkan jumlah penabung melalui produk tabungan berbasis *skema saving plan* Tapera.

Pendapatan dan Profitabilitas Segmen Usaha

Uraian pendapatan dan profitabilitas segmen usaha disajikan sebagai berikut:

Tabel Pendapatan dan Profitabilitas Segmen Usaha

Uraian	2023				2022			
	Konvensional	Syariah	Eliminasi	Total	Konvensional	Syariah	Eliminasi	Total
Pendapatan segmen	24.722.529	3.558.723	-	28.281.252	23.233.200	2.674.168	-	25.907.368
Beban segmen	(13.406.425)	(1.444.537)	-	(14.850.962)	(10.036.723)	(873.361)	-	(10.910.084)
Pendapatan segmen - neto	11.316.104	2.114.186	-	13.430.290	13.196.477	1.800.807	-	14.997.284
Pendapatan operasional lainnya	4.161.842	154.971	(425.666)	3.891.147	2.405.171	78.845	(209.164)	2.274.852
Penyisihan kerugian penurunan nilai aset keuangan dan non-aset keuangan	(3.653.668)	(111.729)	-	(3.765.397)	(3.414.717)	(602.661)	-	(4.017.378)
Pembalikan penyisihan estimasi kerugian komitmen dan ontijensi-bersih	1.139	-	-	1.139	(1.074)	-	-	(1.074)
Beban operasional lainnya	(7.988.114)	(1.455.002)	425.666	(9.017.450)	(8.704.656)	(943.389)	209.164	(9.438.881)
Laba operasional	3.837.303	702.426	-	4.539.729	3.481.201	333.602	-	3.814.803
Pendapatan (beban) bukan operasional - neto	(159.428)	(91)	-	(159.519)	60.912	(25)	-	60.887
Beban pajak				(879.222)				(830.617)
Laba tahun berjalan				3.500.988				3.045.073
Total aset	392.854.285	54.288.709	(8.393.258)	438.749.736	364.284.663	45.335.575	(7.471.926)	402.148.312
Total liabilitas dan dana syirkah temporer	363.082.327	53.581.515	(8.393.258)	408.270.584	338.723.316	44.987.568	(7.471.926)	376.238.958

Tabel Pendapatan dan Profitabilitas Segmen Usaha

Uraian	Pertumbuhan Nominal 2022-2023				Pertumbuhan Persentase 2022-2023			
	Konvensional	Syariah	Eliminasi	Total	Konvensional	Syariah	Eliminasi	Total
Pendapatan segmen	1.489.329	884.555	-	2.373.884	6,41%	33,08%	0,00%	9,16%
Beban segmen	(3.369.702)	(571.176)	-	(3.940.878)	33,57%	65,40%	0,00%	36,12%
Pendapatan segmen - neto	(1.880.373)	313.379	-	(1.566.994)	(14,25%)	17,40%	0,00%	(10,45%)
Pendapatan operasional lainnya	1.756.671	76.126	(216.502)	1.616.295	73,04%	96,55%	103,51%	71,05%
Penyisihan kerugian penurunan nilai aset keuangan dan non-aset keuangan	(238.951)	490.932	-	251.981	7,00%	(81,46%)	0,00%	(6,27%)
Pembalikkan penyisihan estimasi kerugian komitmen dan onjtijensi-bersih	2.213	-	-	2.213	(206,05%)	0,00%	0,00%	(206,05%)
Beban operasional lainnya	716.542	(511.613)	216.502	421.431	(8,23%)	54,23%	103,51%	(4,46%)
Laba operasional	356.102	368.824	-	724.926	10,23%	110,56%	0,00%	19,00%
Pendapatan (beban) bukan operasional - neto	(220.340)	(66)	-	(220.406)	(361,73%)	264,00%	0,00%	(361,99%)
Beban pajak				(48.605)				5,85%
Laba tahun berjalan				455.915				14,97%
Total aset	28.569.622	8.953.134	(921.332)	36.601.424	7,84%	19,75%	12,33%	9,10%
Total liabilitas dan dana syirkah temporer	24.359.011	8.593.947	(921.332)	32.031.626	7,19%	19,10%	12,33%	8,51%

Pertumbuhan Pendapatan dan Profitabilitas tiap-tiap Segmen usaha adalah sebagai berikut:

- Konvensional**

Perseroan membukukan Pendapatan bersih Segmen Konvensional tahun 2023 adalah sebesar Rp11,32 triliun, menurun 14,25% dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar Rp13,20 triliun. Demikian pula dengan laba operasional dari segmen konvensional yang meningkat 10,32% menjadi sebesar Rp3,84 triliun pada tahun 2023 dibanding dengan tahun 2022 yang sebesar Rp3,48 triliun. Peningkatan laba tersebut didampingi dengan meningkatnya pendapatan operasional lainnya pada tahun 2023.

- Syariah**

Perseroan membukukan Pendapatan bersih segmen Syariah tahun 2023 adalah sebesar Rp2,11 triliun, meningkat 17,40% dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp1,80 triliun. Peningkatan ini sejalan dengan meningkatnya laba operasional dari segmen syariah yang naik 110,56% menjadi Rp702,43 miliar pada tahun 2023 dibanding tahun 2022 sebesar Rp333,60 miliar. Peningkatan laba tersebut didampingi dengan meningkatnya pendapatan operasional lainnya pada tahun 2023.



Proyek Strategis Nasional (PSN) atau Penugasan Lain

Informasi mengenai penugasan lain yang diamanatkan Pemerintah kepada Perseroan adalah sebagai berikut:

Tabel Penugasan Lain

No.	Dasar/Aturan Penugasan	Nama Program	Penjelasan Program	Jumlah Kuota yang Diamanatkan Pemerintah	Jumlah Penyaluran/ Realisasi
	a. Surat Kementerian Badan Usaha Milik Negara (KBUMN) Nomor S-43/DKU.MBU/10/2022 tanggal 12 Oktober 2022 perihal Petunjuk/ Pedoman Teknis Pelaksanaan Evaluasi atas Tingkat Kesehatan Dana Pensiun Pemberi Kerja Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP). b. Surat Kementerian Badan Usaha Milik Negara (KBUMN) Nomor S-1/DKU.MBU/01/2023 tanggal 4 Januari 2023 perihal Penyampaian Informasi-Informasi Penting Mengenai Audit Tahun 2022 dan RKAP Tahun 2023.	Penyusunan <i>Roadmap</i> Penyehatan Dana Pensiun PPMP BUMN.	Menyusun <i>Roadmap</i> Penyehatan/Penguatan Dana Pensiun Bank BTN	1	1
	Surat Kementerian BUMN Nomor S-104/DSI.MBU/08/2023 tanggal 8 Agustus 2023 Perihal Pelaksanaan <i>Human Capital Maturity Assessment</i> Badan Usaha Milik Negara	Human Capital (HC) <i>Maturity Assessment</i>	Melakukan HC <i>Maturity Assessment</i> Pengelolaan SDM yang akan dijadikan acuan Kementerian BUMN dalam menyusun strategi dan program pengelolaan SDM BUMN untuk mendukung transformasi BUMN secara berkelanjutan.	1	1
	a. Surat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Nomor B/KUR/335/D.I.M.EKON/12/2022 tanggal 28 Desember 2022 perihal Plafon Penyaluran KUR Tahun 2023 BTN. b. Surat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Nomor PK.KUR/199/D.I.M.EKON/11/2023 tanggal 3 November 2023 perihal Penyesuaian Plafon Penyaluran KUR Tahun 2023 BTN.	Kredit Usaha Rakyat (KUR)	KUR merupakan kredit modal kerja dan/atau investasi yang diberikan oleh Bank kepada debitur yang bergerak dalam bidang usaha yang menurut skalanya berstatus sebagai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di bidang usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.	Rp2,00 triliun	Realisasi Rp1,80 triliun

No.	Dasar/Aturan Penugasan	Nama Program	Penjelasan Program	Jumlah Kuota yang Damanatkan Pemerintah	Jumlah Penyaluran/ Realisasi
	Perjanjian Kerja Sama antara Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk tentang Penyaluran Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan Melalui Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. a. Perjanjian Kerja Sama Nomor 59/PKS/DIR/2022 b. Perjanjian Kerja Sama Nomor 53/PKS/BP-TPR/I/12/2022	Penyaluran KPR FLPP oleh Bank BTN	KPR FLPP merupakan dukungan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan rumah tapak atau rumah susun kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).	126.316 unit	126.316 unit
	Perjanjian Kerja Sama antara Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk tentang Penyaluran Pembiayaan Perumahan Bagi Peserta Tabungan Perumahan Rakyat. a. Perjanjian Kerja Sama Nomor 61/PKS/DIR/2022 b. Perjanjian Kerja Sama Nomor 15/PKS/BP-TPR/IV/12/2022	Penyaluran KPR Tapera oleh Bank BTN	KPR Tapera adalah pinjaman yang diberikan untuk pembelian rumah pertama khusus untuk PNS Peserta Tapera.	4.000 unit	4.503 unit
	Perjanjian Kerja Sama antara Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk tentang Penyaluran Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan Pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Tahun 2023. a. Perjanjian Kerja Sama Nomor 02/PKS/DIR/2023 b. Perjanjian Kerja Sama Nomor 01/PKS/Satker-DJPI/2023	Penyaluran Subsidi Bantuan Uang Muka oleh Bank BTN	SBUM merupakan fasilitas pembiayaan perumahan yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Bantuan yang diberikan berupa pemenuhan sebagian atau seluruh uang muka perolehan rumah.	126.316	126.316



Tinjauan Keuangan

Tinjauan keuangan yang diuraikan berikut mengacu kepada Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 yang disajikan dalam Laporan Tahunan ini. Laporan Keuangan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja dan mendapat opini menyajikan

secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk pada tanggal 31 Desember 2023 serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan Perseroan terdiri atas kinerja Laporan Posisi Keuangan, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain serta Laporan Arus Kas disajikan sebagai berikut.

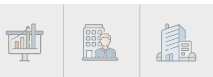
Laporan Posisi Keuangan

Tabel Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
ASET				
KAS	2.127.489	1.661.533	465.956	28,04%
GIRO PADA BANK INDONESIA	18.145.761	25.416.941	(7.271.180)	(28,61%)
GIRO PADA BANK LAIN				
Pihak ketiga	1.153.949	963.935	190.014	19,71%
Pihak berelasi	1.049.449	508.322	541.127	106,45%
	2.203.398	1.472.257	731.141	49,66%
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.804)	(1.747)	(57)	3,26%
	2.201.594	1.470.510	731.084	49,72%
PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN				
Pihak ketiga	30.561.061	12.975.894	17.585.167	135,52%
Pihak berelasi	61	61	-	0,00%
	30.561.122	12.975.955	17.585.167	135,52%
EFEK-EFEK				
Pihak ketiga	1.454.768	873.109	581.659	66,62%
Pihak berelasi	3.851.105	850.059	3.001.046	353,04%
	5.305.873	1.723.168	3.582.705	207,91%
Cadangan kerugian penurunan nilai	(22.903)	(2.399)	(20.504)	854,69%
	5.282.970	1.720.769	3.562.201	207,01%
OBLIGASI PEMERINTAH				
Pihak berelasi	35.893.929	51.964.973	(16.071.044)	(30,93%)
EFEK-EFEK YANG DIBELI DENGAN JANJI DIJUAL KEMBALI				
Pihak ketiga	-	1.434.190	(1.434.190)	(100,00%)
Pihak berelasi	-	-	-	-

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN/ PIUTANG SYARIAH				
Kredit yang diberikan				
Pihak ketiga	268.898.377	247.217.823	21.680.554	8,77%
Pihak berelasi	27.685.483	19.439.742	8.245.741	42,42%
	296.583.860	266.657.565	29.926.295	11,22%
Cadangan kerugian penurunan nilai	(14.191.536)	(14.104.914)	(86.622)	0,61%
	282.392.324	252.552.651	29.839.673	11,82%
Pembiayaan/piutang syariah				
Pihak ketiga	37.027.078	31.367.082	5.659.996	18,04%
Pihak berelasi	87.203	257.057	(169.854)	(66,08%)
	37.114.281	31.624.139	5.490.142	17,36%
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.400.428)	(1.570.009)	169.581	(10,80%)
	35.713.853	30.054.130	5.659.723	18,83%
	318.106.177	282.606.781	35.499.396	12,56%
TAGIHAN DERIVATIF				
Pihak ketiga	32.176	103.939	(71.763)	(69,04%)
TAGIHAN AKSEPTASI				
Pihak ketiga	475.821	289.206	186.615	64,53%
Pihak berelasi	68.746	131.356	(62.610)	(47,66%)
Cadangan kerugian penurunan nilai	(23.876)	(136)	(23.740)	17.455,88%
	520.691	420.426	100.265	23,85%
ASET TETAP				
Biaya perolehan/nilai revaluasi	12.953.746	10.599.848	2.353.898	22,21%
Akumulasi penyusutan	(4.835.934)	(4.246.045)	(589.889)	13,89%
	8.117.812	6.353.803	1.764.009	27,76%
BUNGA YANG MASIH AKAN DITERIMA	11.526.687	10.750.302	776.385	7,22%
ASET PAJAK TANGGUHAN - NETO	2.998.282	2.915.428	82.854	2,84%
ASET LAIN-LAIN	3.235.046	2.352.762	882.284	37,50%
TOTAL ASET	438.749.736	402.148.312	36.601.424	9,10%
LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS				
LIABILITAS				
LIABILITAS SEGERA	3.277.514	3.205.358	72.156	2,25%
SIMPANAN DARI NASABAH				
Giro				
Pihak ketiga	20.957.283	17.636.481	3.320.802	18,83%
Pihak berelasi	108.412.008	87.264.437	21.147.571	24,23%
	129.369.291	104.900.918	24.468.373	23,33%
Giro Wadiah				
Pihak ketiga	2.402.428	1.783.134	619.294	34,73%
Pihak berelasi	11.037.037	6.841.675	4.195.362	61,32%
	13.439.465	8.624.809	4.814.656	55,82%
	142.808.756	113.525.727	29.283.029	25,79%



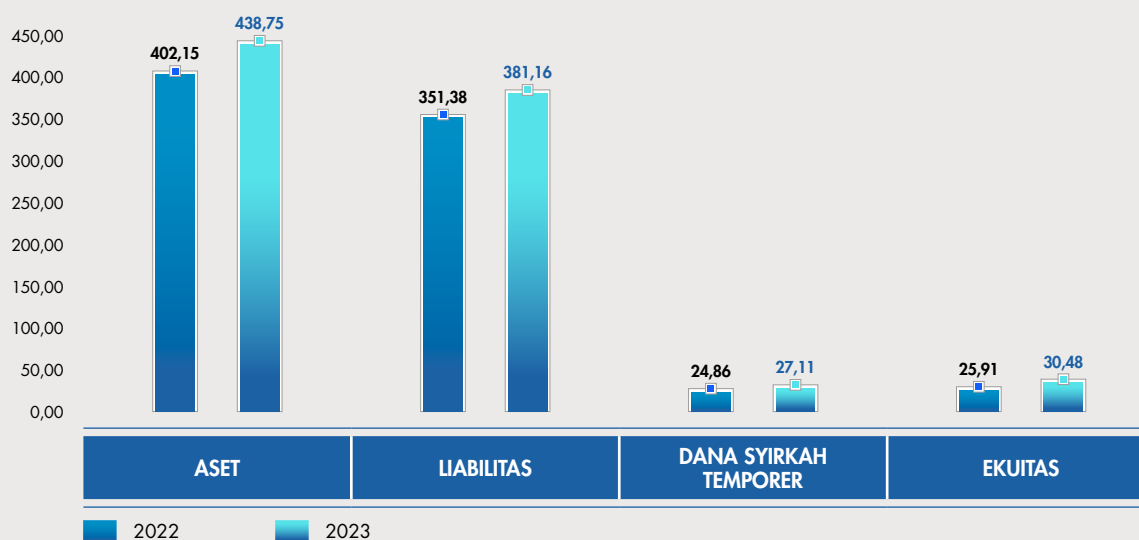
Uraian	2023	2022	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Tabungan				
Pihak ketiga	37.029.999	35.656.990	1.373.009	3,85%
Pihak berelasi	692.162	525.339	166.823	31,76%
	37.722.161	36.182.329	1.539.832	4,26%
Tabungan Wadiah				
Pihak ketiga	1.274.456	1.192.775	81.681	6,85%
Pihak berelasi	2.136	943	1.193	126,51%
	1.276.592	1.193.718	82.874	6,94%
	38.998.753	37.376.047	1.622.706	4,34%
Deposito berjangka				
Pihak ketiga	63.976.056	66.808.185	(2.832.129)	(4,24%)
Pihak berelasi	76.717.583	79.389.842	(2.672.259)	(3,37%)
	140.693.639	146.198.027	(5.504.388)	(3,77%)
Total simpanan dari nasabah	322.501.148	297.099.801	25.401.347	8,55%
SIMPANAN DARI BANK LAIN				
Pihak ketiga	91.312	136.408	(45.096)	(33,06%)
LIABILITAS AKSEPTASI				
Pihak ketiga	320.522	302.037	18.485	6,12%
Pihak berelasi	224.045	118.525	105.520	89,03%
	544.567	420.562	124.005	29,49%
LIABILITAS DERIVATIF				
Pihak ketiga	-	-	-	-
SURAT-SURAT BERTAHAP YANG DITERBITKAN				
Pihak ketiga	2.403.573	4.297.252	(1.893.679)	(44,07%)
Pihak berelasi	5.868.525	4.355.008	1.513.517	34,75%
	8.272.098	8.652.260	(380.162)	(4,39%)
PINJAMAN YANG DITERIMA				
Pihak ketiga	11.308.799	7.365.320	3.943.479	53,54%
Pihak berelasi	22.453.290	17.455.685	4.997.605	28,63%
	33.762.089	24.821.005	8.941.084	36,02%
BUNGA YANG MASIH HARUS DIBAYAR	647.496	629.366	18.130	2,88%
ESTIMASI KERUGIAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI	3.580	4.719	(1.139)	(24,14%)
LIABILITAS IMBALAN KERJA DAN LAIN-LAIN	2.951.848	7.248.985	(4.297.137)	(59,28%)
PINJAMAN SUBORDINASI				
Pihak ketiga	4.612.840	4.658.242	(45.402)	(0,97%)
Pihak berelasi	4.499.997	4.499.977	20	0,00%
	9.112.837	9.158.219	(45.382)	(0,50%)
TOTAL LIABILITAS	381.164.489	351.376.683	29.787.806	8,48%
DANA SYIRKAH TEMPORER				
SIMPANAN NASABAH				
Giro Mudharabah				
Pihak ketiga	712.587	468.889	243.698	51,97%

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Pihak berelasi	13.474	11.897	1.577	13,26%
	726.061	480.786	245.275	51,02%
Tabungan <i>Mudharabah</i>				
Pihak ketiga	5.331.249	4.730.686	600.563	12,70%
Pihak berelasi	141.993	88.427	53.566	60,58%
	5.473.242	4.819.113	654.129	13,57%
Deposito berjangka <i>Mudharabah</i>				
Pihak ketiga	11.975.188	11.886.366	88.822	0,75%
Pihak berelasi	8.908.369	7.637.191	1.271.178	16,64%
	20.883.557	19.523.557	1.360.000	6,97%
Total simpanan nasabah	27.082.860	24.823.456	2.259.404	9,10%
SIMPANAN DARI BANK LAIN				
<i>Giro Mudharabah</i>				
Pihak ketiga	4.154	56	4.098	7.317,86%
Tabungan <i>Mudharabah</i>				
Pihak ketiga	14.781	19.674	(4.893)	(24,87%)
Deposito berjangka <i>Mudharabah</i>				
Pihak ketiga	4.300	19.089	(14.789)	(77,47%)
Total simpanan dari bank lain	23.235	38.819	(15.584)	(40,15%)
TOTAL DANA SYIRKAH TEMPORER	27.106.095	24.862.275	2.243.820	9,02%
EKUITAS				
Modal saham				
Modal dasar				
Modal ditempatkan dan disetor penuh	7.017.222	5.295.000	1.722.222	32,53%
Tambahan modal disetor	4.418.900	2.054.454	2.364.446	115,09%
Dana Setoran Modal	-	2.756.575	(2.756.575)	(100,00%)
Keuntungan neto yang belum direalisasi dan cadangan kerugian penurunan nilai atas efek-efek dan obligasi Pemerintah setelah pajak tangguhan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	(769.001)	(1.193.252)	424.251	(35,55%)
Pengukuran kembali program imbalan pasti - setelah pajak tangguhan	(560.339)	(409.657)	(150.682)	36,78%
Bagian efektif lindung nilai efektif lindung nilai	(32.346)	(49.301)	16.955	(34,39%)
Surplus Revaluasi Aset Tetap	3.565.773	3.508.565	57.208	1,63%
Saldo laba*)				
Telah ditentukan penggunaannya	13.181.214	10.745.157	2.436.057	22,67%
Belum ditentukan penggunaannya	3.657.729	3.201.813	455.916	14,24%
TOTAL EKUITAS	30.479.152	25.909.354	4.569.798	17,64%
TOTAL LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS	438.749.736	402.148.312	36.601.424	9,10%

*) Saldo defisit sebesar Rp14.226.290 juta telah dieliminasi akibat kuasi reorganisasi pada tanggal 31 Mei 2007.

Grafik Laporan Posisi Keuangan

(dalam triliun Rupiah)



Aset

Total Aset tahun 2023 adalah sebesar Rp438,75 triliun, meningkat 9,10% dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar Rp402,15 triliun. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh penempatan pada Bank Indonesia dan Bank lain, giro pada bank lain, efek-efek, kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah.

Kas

Perseroan membukukan kas senilai Rp2,13 triliun, tumbuh 28,04% dibanding tahun 2022 yang mencapai Rp1,66 triliun. Kenaikan ini terutama dipengaruhi oleh bertambahnya kas dalam mata uang Rupiah senilai Rp2,09 triliun pada tahun 2023 dari tahun sebelumnya senilai Rp1,65 triliun. Kas (terutama terdiri dari kas di kasan dan kas di ATM) dan setara kas mencakup kas, giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain dan investasi jangka pendek likuiditas lainnya dengan jangka waktu jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang sejak tanggal perolehan.

Giro Pada Bank Indonesia

Giro pada bank Indonesia menunjukkan penurunan sebesar 28,61% dari Rp25,42 triliun pada tahun 2022 menjadi Rp18,16 triliun pada tahun 2023. Penurunan Giro Pada Bank Indonesia terutama terjadi pada mata uang Rupiah dari Rp25,19 triliun pada tahun 2022 menjadi Rp17,61 triliun di tahun 2023. Dan penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan Rasio GWM yang harus dipenuhi dari tahun 2022 sebesar 8,10% menjadi 5,80% pada tahun 2023. Pada

tanggal 31 Desember 2023, Perseroan telah memenuhi rasio sesuai ketentuan yang diatur oleh Bank Indonesia dengan rasio GWM Rupiah dan Valuta Asing serta PLM yaitu masing-masing sebesar 5,80% ; 4,00% ; 5,00%.

Giro Pada Bank Lain

Giro pada bank lain yang dibukukan Perseroan mencapai Rp2,20 triliun dengan pertumbuhan 49,72% pada tahun 2023 dibanding tahun 2022 sebesar Rp1,47 triliun. Kenaikan ini terutama dipengaruhi oleh peningkatan giro pada bank lain dalam valas sebesar 111,26% menjadi Rp1,97 triliun pada tahun 2023. Cadangan kerugian penurunan nilai senilai Rp1,80 miliar tahun 2023 dan Rp1,74 miliar pada tahun 2022. Adapun suku bunga rata-rata per tahun untuk akun ini dalam mata uang Rupiah sebesar 0,69%.

Penempatan Pada Bank Indonesia dan Bank Lain

Perseroan membukukan penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain sebesar Rp30,56 triliun pada tahun 2023. Pencapaian ini tumbuh 135,52% dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp12,98 triliun. Kenaikan ini sejalan dengan adanya penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain dalam mata uang asing dari pihak ketiga di tahun 2023 sebesar Rp18,41 triliun dan penempatan dengan tenor ≤ 1 bulan.

Seluruh penempatan pada bank Indonesia dan bank lain pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 diklasifikasikan sebagai lancar dengan tingkat suku bunga rata-rata untuk Rupiah sebesar 5,23% dan mata uang asing sebesar 5,24% pada tahun 2023.

Efek-Efek

Efek-efek neto yang dimiliki oleh Perseroan mengalami kenaikan sebesar 207,91% menjadi Rp5,28 triliun pada tahun 2023 dari Rp1,72 triliun pada tahun 2022. Kenaikan ini sejalan dengan dengan peningkatan efek-efek dari pihak ketiga dan pihak berelasi dengan masing-masing sebesar 66,62% dan 353,04%. Terdapat investasi efek-efek dengan pihak berelasi sebesar Rp3,85 triliun dan Rp850 miliar pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

Obligasi Pemerintah

Berbeda dengan efek-efek, kepemilikan Perseroan atas Obligasi pemerintah mengalami penurunan sebesar 30,93% dari Rp51,96 triliun pada tahun 2022 menjadi Rp35,89 triliun di tahun 2023. Penurunan tersebut disebabkan oleh adanya surat berharga yang telah jatuh tempo.

Efek-Efek yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali

Perseroan pada tahun 2022 membuku tagihan atas efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali sebesar Rp1,43 triliun, dan pada tahun 2023 Perseroan tidak membuku efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali.

Kredit yang Diberikan dan Pembiayaan/Piutang Syariah

Ekspansi penyaluran kredit dan piutang/pembiayaan syariah yang dilakukan Perseroan di tengah momentum perbaikan ekonomi mampu mendorong pertumbuhan akun ini sebesar 12,56% menjadi Rp318,11 triliun pada tahun 2023 dibanding tahun 2022 senilai Rp282,61 triliun. Kenaikan ini juga berasal dari piutang/pembiayaan syariah yang tumbuh 18,83% menjadi Rp35,71 triliun pada tahun 2023 dari Rp30,05 triliun pada tahun 2022.

Selain itu, pertumbuhan penyaluran kredit dan piutang/pembiayaan syariah pada tahun 2023 juga didorong oleh kenaikan semua jenis kredit dan pembiayaan. Tiga jenis kredit dan piutang/pembiayaan syariah yang memiliki kontribusi terbesar pada tahun 2023 adalah konsumsi sebesar 81,23%, modal kerja sebesar 11,38% dan investasi sebesar 4,65%.

Kenaikan kredit ini terutama berasal dari kredit investasi tumbuh 33,39% menjadi Rp15,53 triliun dari Rp11,64 triliun, dan kredit sindikasi tumbuh 58,75% menjadi Rp7,15 triliun dari Rp2,10 triliun. Sementara itu, peningkatan daya beli masyarakat yang meningkat terefleksi dari kenaikan kredit konsumen yang mampu tumbuh tumbuh 10,38% menjadi Rp271,08 triliun pada tahun 2023 dari Rp245,58 triliun tahun sebelumnya.

Disisi lain, tiga industri penerima penyaluran kredit Perseroan terbesar adalah perumahan sebesar 85,62%, konstruksi sebesar 4,10%, dan Jasa usaha sebesar 3,34% yang masing-masing tumbuh sebesar 22,45%; 4,48% dan 53,41% pada tahun 2023 menjadi Rp285,69 triliun; Rp13,67 triliun; dan Rp11,14 triliun.

Tagihan Derivatif

Jumlah Tagihan Derivatif tahun 2023 adalah sebesar Rp32,17 miliar menurun sebesar 69,04% dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar Rp103,94 miliar. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh adanya penarikan transaksi derivatif dari berbagai bank.

Tagihan Akseptasi

Tagihan akseptasi Perseroan mengalami kenaikan 23,85% pada tahun 2023 menjadi Rp520,69 triliun dari Rp420,42 miliar ditahun 2022. Kenaikan ini terutama berasal meningkatnya transaksi SKBDN dari pihak ketiga menjadi Rp475,82 miliar pada tahun 2023 dari Rp282,05 miliar pada tahun 2022.

Aset Tetap

Perseroan membukukan aset tetap-neto tahun 2023 sebesar Rp8,12 triliun atau tumbuh 27,76% dibandingkan tahun 2022 yang mencapai Rp6,35 triliun. Untuk mendukung kelancaran operasional dan kapasitas Teknologi Informasi (TI), di tahun 2023 Perseroan melakukan aktivitas pembelian aset tetap dan pengembangan infrastruktur Teknologi Informasi (TI). Beberapa di antaranya yaitu pembelian tanah untuk pengembangan jaringan kantor, pembangunan gedung kantor, mobil kas keliling, mesin pendukung operasional dan pengembangan aplikasi/software.

Bunga yang Masih Akan Diterima

Bunga yang Masih Akan Diterima tahun 2023 adalah sebesar Rp11,53 triliun, meningkat 7,22% dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar Rp10,75 triliun. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan nilai bunga yang masih akan diterima atas kredit yang diberikan Perseroan pada tahun 2023.

Aset Pajak Tangguhan - Neto

Perseroan membukukan aset pajak tangguhan tahun 2023 mencapai Rp2,99 triliun atau tumbuh 2,84% dibanding tahun 2022 sebesar Rp2,92 triliun. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya perbedaan temporer antara laporan keuangan dan pajak.



Aset Lain-Lain

Perseroan membukukan jumlah aset lain-lain tahun 2023 mencapai Rp3,23 triliun atau tumbuh 37,50% dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp2,35 triliun. Kenaikan akun ini terutama dipengaruhi oleh tagihan (piutang) kepada nasabah dan pihak lainnya dari Rp1,04 triliun ditahun 2022 menjadi Rp1,87 triliun pada tahun 2023.

Liabilitas

Total Liabilitas tahun 2023 adalah sebesar Rp381,16 triliun, meningkat 8,48% dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar Rp351,38 triliun. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan jumlah liabilitas akseptasi, simpanan dari nasabah, serta pinjaman yang diterima.

Liabilitas Segera

Perseroan membukukan liabilitas segera tahun 2023 sebesar Rp3,28 triliun, meningkat 2,25% dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp3,21 triliun. Peningkatan tersebut terutama disebabkan adanya deposito berjangka jatuh tempo namun belum diambil nasabah sebesar Rp90,26 miliar dibanding tahun 2022 sebesar Rp14,06 miliar.

Simpanan dari Nasabah

Simpanan nasabah atau dana pihak ketiga (DPK) Perseroan terdiri dari giro dan giro wadiah, tabungan dan tabungan wadiah, serta deposito berjangka. Total DPK Perseroan tahun 2023 mengalami kenaikan 8,55% menjadi Rp322,50 triliun dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp297,01 triliun. Dari jumlah DPK ini, pendanaan berbiaya murah atau CASA pada tahun 2023 mencapai 53,73% atau setara Rp188,01 triliun pada tahun 2023. Pada tahun 2022, rasio CASA mencapai 48,52% atau sekitar Rp156,20 triliun.

Simpanan dari Bank Lain

Perseroan membukukan simpanan dari bank lain berupa giro, deposito dan *interbank call money*. Secara kumulatif, jumlah simpanan dari bank lain mencapai Rp91,31 miliar pada tahun 2023, menurun 33,06% dari Rp136,41 miliar pada tahun 2022. Penurunan ini dikarenakan adanya simpanan yang telah jatuh tempo.

Liabilitas Akseptasi

Perseroan membukukan liabilitas akseptasi sebesar Rp544,57 miliar pada tahun 2023, tumbuh 29,49% dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp420,56 miliar. Kenaikan ini seiring dengan meningkatnya Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) dibanding tahun sebelumnya.

Surat-Surat Berharga yang Diterbitkan

Jumlah Surat-surat Berharga yang Diterbitkan tahun 2023 adalah sebesar Rp8,27 triliun, menurun 4,39% dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar Rp8,65 triliun. Penurunan tersebut terutama dikarenakan adanya pelunasan saat jatuh tempo atas surat berharga yang diterbitkan yaitu Obligasi berkelanjutan I tahap II.

Pinjaman yang Diterima

Pinjaman yang diterima Perseroan mencapai Rp33,76 triliun, meningkat 36,02% dibanding dari tahun 2022 sebesar Rp24,82 triliun. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pinjaman yang diterima dalam mata uang rupiah dari Bank Central Asia sebesar Rp8,42 triliun dari tahun sebelumnya sebesar Rp4,42 triliun tahun 2022, serta pinjaman dari PT Sarana Multigriya Finansial (PT SMF) sebesar Rp22,46 triliun yang sebelumnya Rp17,46 triliun di tahun 2022.

Bunga yang Masih Harus Dibayar

Bunga yang masih harus dibayar Perseroan tahun 2023 sebesar Rp647,49 miliar, meningkat 2,88% dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar Rp629,37 miliar. Hal tersebut terutama disebabkan oleh kewajiban pembayaran bunga atas pinjaman yang diterima Perseroan yang meningkat di tahun 2023.

Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi

Perseroan membukukan estimasi kerugian atas komitmen dan kontinjensi sebesar Rp3,58 miliar, menurun 24,14% dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp4,72 miliar. Penurunan tersebut berbanding lurus dengan exposure komitmen dan kontinjensi Perseroan di tahun 2023.

Liabilitas Imbalan Kerja dan Lain-Lain

Perseroan membukukan liabilitas imbalan kerja dan lain-lain 2023 sebesar Rp2,95 triliun, menurun 59,28% dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar Rp7,25 triliun. Penurunan tersebut diakibatkan oleh akun dana jaminan pengembang yang dimigrasi ke produk giro di tahun 2023.

Pinjaman Subordinasi dan Efek-Efek Subordinasi

Jumlah Pinjaman Subordinasi dan efek-efek Subordinasi Perseroan tahun 2023 sebesar Rp9,11 triliun, menurun 0,50% dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar Rp9,16 triliun. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh adanya selisih kurs obligasi subordinasi dalam valuta asing.

Dana Syirkah Temporer

Dana *syirkah* temporer adalah penerimaan dana dari investasi *mudharabah muthlaqah*, *mudharabah muqayyadah*, *musyarakah* dan akun lain lain yang sejenis. Dana *syirkah temporer* terdiri dari tabungan *mudharabah*, deposito *mudharabah* dan *musyarakah*. Jumlah dana *syirkah temporer* tahun 2023 adalah sebesar Rp27,11 triliun, meningkat 9,02% dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar Rp24,86 triliun. Peningkatan dana *syirkah temporer* terutama berasal dari pertumbuhan deposito berjangka *mudharabah* dari pihak berelasi.

Simpanan Nasabah

Simpanan nasabah Perseroan terdiri dari giro *mudharabah*, tabungan *mudharabah* dan deposito berjangka *mudharabah*. Bank membukukan simpanan nasabah sebesar Rp27,08 triliun, meningkat 9,10% dari tahun 2022 sebesar Rp24,82 triliun. Peningkatan tersebut karena adanya kenaikan simpanan nasabah dana *syirkah temporer* pada produk deposito berjangka *mudharabah* dan tabungan *mudharabah*.

Simpanan dari Bank Lain

Jumlah simpanan dari bank lain tahun 2023 sebesar Rp23,24 miliar, menurun 40,15% dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar Rp38,82 miliar. Penurunan tersebut karena adanya penurunan simpanan dari Bank Lain Dana *Syirkah Temporer* pada produk Tabungan *Mudharabah* dan Deposito Berjangka *Mudharabah*.

Ekuitas

Perseroan mampu membukukan jumlah ekuitas yang lebih kuat pada tahun 2023 terutama didukung oleh profitabilitas yang lebih baik sehingga meningkatkan saldo laba pada tahun tersebut. Ekuitas Perseroan mencapai sebesar Rp30,48 triliun, meningkat 17,64% dari tahun 2022 sebesar Rp25,91 triliun. Kenaikan ekuitas ini terutama didukung oleh saldo laba sebesar Rp16,84 triliun pada tahun 2023, tumbuh 20,74% dari tahun 2022 sebesar Rp13,95 triliun.

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh

Perseroan membukukan modal ditempatkan dan disetor penuh tahun 2023 sebesar Rp7,01 triliun, meningkat 32,53% dari tahun 2022 sebesar Rp5,30 triliun. Peningkatan ini dikarenakan adanya tambahan dari *Right Issue* Perseroan berupa HMETD II pada tahun 2022/2023.

Tambahan Modal Disetor

Perseroan membukukan tambahan modal disetor tahun 2023 sebesar Rp4,42 triliun, meningkat 115,09% dari tahun 2022 sebesar Rp2,05 triliun. Peningkatan ini terutama dikarenakan oleh tambahan modal disetor akibat Penawaran Umum HMETD II pada tahun 2022/2023 sebesar Rp2,41 triliun.

Keuntungan Neto yang Belum Direalisasi dan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Atas Efek-Efek dan Obligasi Pemerintah Setelah Pajak Tangguhan Nilai Wajar Melalui Penghasilan Komprehensif Lain

Keuntungan neto yang belum direalisasi atas efek-efek dan obligasi pemerintah yang diukur berdasarkan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif, setelah pajak tangguhan tahun 2023 adalah (Rp769,00) miliar, membaik 35,75% dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar (Rp1,12) triliun. Hal ini terjadi dikarenakan perbaikan kualitas kolektabilitas pada efek-efek dan obligasi pemerintah.

Pengukuran Kembali Program Imbalan Pasti - Setelah Pajak Tangguhan

Pengukuran kembali program imbalan pasti - setelah pajak tangguhan tahun 2023 adalah sebesar (Rp560,34) miliar, menurun 36,78% dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar (Rp409,66) miliar. Hal tersebut karena adanya dampak atas perhitungan program imbalan kerja (PSAK 24) yang berpengaruh kepada beban komprehensif Perseroan di tahun 2023.

Bagian Efektif Lindung Nilai Arus Kas

Bagian efektif lindung nilai - arus kas tahun 2023 adalah sebesar (Rp32,35) miliar, membaik 34,39% dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar (Rp49,30) miliar. Hal tersebut karena adanya peningkatan laba komprehensif tahun berjalan terkait dengan lindung nilai.

Surplus Revaluasi Aset Tetap

Surplus revaluasi aset tetap tahun 2023 adalah sebesar Rp3,57 triliun, meningkat 1,63% dari tahun 2022 yang sebesar Rp3,51 triliun. Hal tersebut dipengaruhi adanya beberapa aset tetap yang dilakukan penilaian kembali (revaluasi) pada tahun 2023.

Saldo Laba

Jumlah saldo laba tahun 2023 adalah sebesar Rp16,84 triliun, meningkat 20,74% dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar Rp13,95 triliun. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh laba tahun berjalan yang meningkat pada tahun 2023 menjadi sebesar Rp3,50 triliun dibanding tahun sebelumnya Rp3,05 triliun.

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

Tabel Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

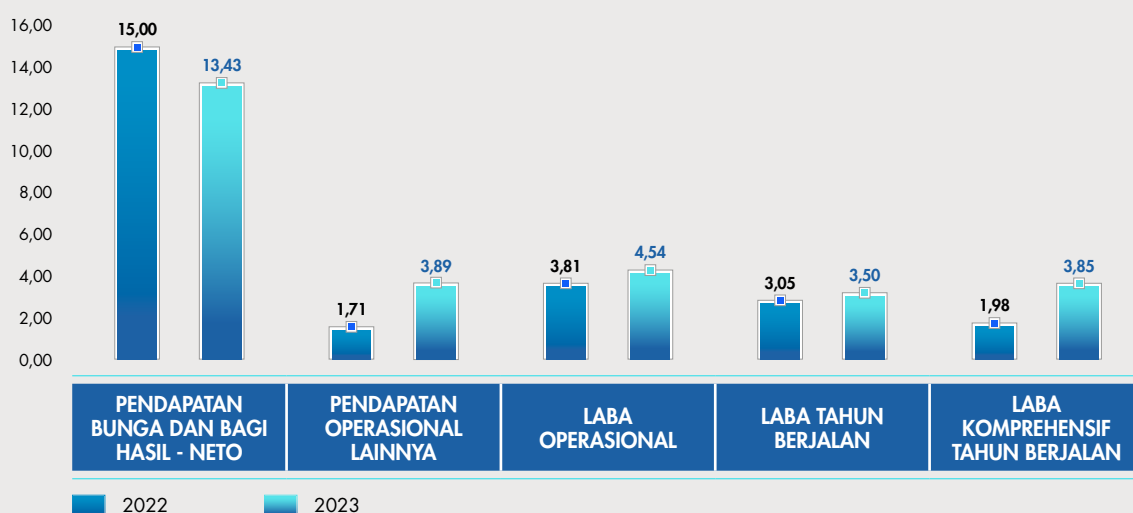
(dalam jutaan Rupiah)

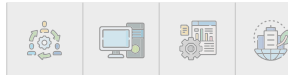
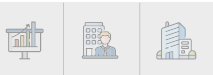
Uraian	2023	2022	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL				
Pendapatan Bunga dan Bagi Hasil				
Bunga	24.722.529	23.233.200	1.489.329	6,41%
Bagi hasil dan margin unit syariah	3.558.723	2.674.168	884.555	33,08%
Total Pendapatan Bunga dan Bagi Hasil	28.281.252	25.907.368	2.373.884	9,16%
Beban Bunga, Bagi Hasil dan Bonus				
Bunga	(13.203.108)	(9.866.919)	(3.336.189)	33,81%
Beban pendanaan lainnya	(203.317)	(169.804)	(33.513)	19,74%
Bonus Simpanan Wadiah	(71.621)	(57.558)	(14.063)	24,43%
Hak Pihak Ketiga atas Bagi hasil <i>Mudharabah</i>	(1.372.916)	(815.803)	(557.113)	68,29%
Total Beban Bunga, Bagi Hasil dan Bonus	(14.850.962)	(10.910.084)	(3.940.878)	36,12%
Pendapatan Bunga dan Bagi Hasil - Neto	13.430.290	14.997.284	(1.566.994)	(10,45%)
Pendapatan Operasional Lainnya				
Pungutan administrasi dan denda atas simpanan dan kredit yang diberikan	1.096.346	965.441	130.905	13,56%
Pendapatan dari penerimaan kredit yang dihapusbukukan	934.191	431.591	502.600	116,45%
Keuntungan (Kerugian) dari penjualan efek-efek - neto	6.669	(234.089)	240.758	(102,85%)
Keuntungan (Kerugian) dari penjualan obligasi pemerintah - neto	541.392	(266.235)	807.627	(303,35%)
Keuntungan (Kerugian) yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar efek-efek - neto	1.802	(64.931)	66.733	(102,78%)
Keuntungan (Kerugian) Keuntungan yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar obligasi pemerintah - neto	(5.780)	55.045	(60.825)	(110,50%)
Lain-lain	1.310.747	822.775	487.972	59,31%
Total Pendapatan Operasional Lainnya	3.885.367	1.709.597	2.175.770	127,27%
Penyisihan kerugian penurunan nilai aset keuangan dan non-aset keuangan	(3.765.397)	(4.017.378)	251.981	(6,27%)
(Penyisihan) Pembalikan Estimasi Kerugian Penurunan Nilai Komitmen dan Kontinjensi	1.139	(1.075)	2.214	(205,95%)
Beban Operasional Lainnya				
Umum dan administrasi	(3.884.779)	(3.754.028)	(130.751)	3,48%
Gaji karyawan	(3.982.503)	(4.190.298)	207.795	(4,96%)
Premi program penjaminan Pemerintah	(656.774)	(599.991)	(56.783)	9,46%
Lain-lain	(487.614)	(329.308)	(158.306)	48,07%
Total Beban Operasional Lainnya	(9.011.670)	(8.873.625)	(138.045)	1,56%
LABA OPERASIONAL	4.539.729	3.814.803	724.926	19,00%
PENDAPATAN (BEBAN) BUKAN OPERASIONAL - NETO	(159.519)	60.887	(220.406)	(361,99%)

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK	4.380.210	3.875.690	504.520	13,02%
BEBAN PAJAK	(879.222)	(830.617)	(48.605)	5,85%
LABA TAHUN BERJALAN	3.500.988	3.045.073	455.915	14,97%
Pendapatan Komprehensif Lain:				
Akun-akun yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi				
Revaluasi Aset Tetap	57.208	200.574	(143.366)	(71,48%)
Pengukuran kembali program imbalan pasti	(186.027)	59.872	(245.899)	(410,71%)
Pajak penghasilan terkait akun-akun yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	35.345	(11.376)	46.721	(410,70%)
Akun-akun yang akan direklasifikasi ke laba rugi				
Bagian efektif lindung nilai arus kas	20.932	(40.883)	61.815	(151,20%)
Keuntungan (Kerugian) neto yang belum direalisasi atas perubahan nilai dan cadangan kerugian penurunan nilai efek-efek dan obligasi pemerintah yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	517.528	(1.576.967)	2.094.495	(132,82%)
Pajak penghasilan terkait akun-akun yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(97.254)	307.463	(404.717)	(131,63%)
Total laba (rugi) komprehensif tahun berjalan	3.848.720	1.983.756	1.864.964	94,01%
LABA PER SAHAM				
Dasar (nilai penuh)	249	288	(39)	(13,54%)

Grafik Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam triliun Rupiah)





Pendapatan dan Beban Operasional

Pendapatan Bunga dan Bagi Hasil - Neto

Jumlah Pendapatan Bunga dan Bagi Hasil - Neto tahun 2023 adalah sebesar Rp13,43 triliun, mengalami penurunan 10,45% dari jumlah Pendapatan Bunga dan Bagi Hasil - Neto posisi tahun 2022 sebesar Rp15,00 triliun. Penurunan terjadi karena total beban bunga, bagi hasil dan bonus mengalami peningkatan pada tahun 2023 yang disebabkan oleh kenaikan hak pihak ketiga atas bagi hasil *mudharabah* sebesar 68,29% atau Rp1,37 triliun pada tahun 2023 dibandingkan dengan posisi tahun 2022 sebesar Rp815,80 miliar. Kemudian diikuti juga dengan meningkatnya beban bunga sebesar 33,81% atau Rp13,20 triliun pada tahun 2023 dibandingkan dengan posisi tahun 2022 sebesar Rp9,87 triliun. Sementara itu, pendapatan dari bagi hasil dan margin unit syariah masih memberikan kontribusi terbesar pada tahun 2023 dengan pertumbuhan 33,08% dari total bagi hasil dan margin Syariah pada tahun 2022.

Beban Bunga, Bagi Hasil dan Bonus

Jumlah Beban Bunga dan Bagi Hasil tahun 2023 adalah sebesar Rp14,85 triliun, mengalami kenaikan 36,12% dibandingkan dengan posisi tahun 2022 sebesar Rp10,91 triliun. Kenaikan beban bunga, bagi hasil dan bonus tersebut didominasi oleh meningkatnya hak pihak ketiga atas bagi hasil *mudharabah* sebesar 68,29% dengan posisi tahun 2023 sebesar Rp1,37 triliun dan posisi tahun 2022 sebesar Rp815,80 miliar. Selain itu kenaikan tersebut juga disebabkan karena adanya peningkatan jumlah simpanan nasabah dan bank lain yang menjadi sumber utama pendanaan Bank, sehingga beban bunga meningkat 33,81% atau sebesar Rp13,20 triliun pada tahun 2023 dibandingkan dengan posisi tahun 2022 sebesar Rp9,87 triliun.

Pendapatan Operasional Lainnya

Perseroan membukukan jumlah pendapatan operasional lainnya tahun 2023 adalah sebesar Rp3,89 triliun, meningkat 127,27% dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp1,71 triliun. Kenaikan terbesar berasal dari keuntungan penjualan obligasi pemerintah sebesar Rp541,39 miliar atau naik 303,35% dari tahun sebelumnya, kemudian diikuti dengan adanya peningkatan pada penerimaan kembali aset yang telah dihapusbukukan pada tahun 2023 sebesar Rp934,19 miliar atau naik sebesar 116,45% dari tahun 2022 sebesar Rp431,59 miliar.

Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan dan Non-Aset Keuangan

Jumlah penyisihan kerugian penurunan nilai aset keuangan dan non-aset keuangan 2023 adalah sebesar Rp3,77 triliun lebih rendah 6,27% atau sebesar Rp251,98 miliar dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp4,02 triliun. Penurunan tersebut didukung oleh pengelolaan kredit yang lebih baik dengan pencapaian rasio NPL (*Gross*) sebesar 3,01% pada tahun 2023, lebih rendah dibandingkan tahun 2022 sebesar 3,38%.

(Penyisihan) Pembalikan Estimasi Kerugian Penurunan Nilai Komitmen dan Kontinjensi

Jumlah penyisihan estimasi kerugian penurunan nilai komitmen dan kontinjensi 2023 adalah sebesar Rp1,14 miliar, dibandingkan dengan tahun 2022 yang mengalami pembalikan sebesar Rp1,08 miliar. Peningkatan penyisihan tersebut disebabkan oleh kenaikan kelonggaran tarik kredit/pembiayaan atau LC SKBDN yang belum jatuh tempo.

Beban Operasional Lainnya

Perseroan membukukan total beban operasional lainnya tahun 2023 sebesar Rp9,01 triliun, meningkat 1,56% dibandingkan dengan posisi tahun 2022 sebesar Rp8,87 triliun. Kontribusi terbesar peningkatan disebabkan kenaikan beban lain-lain sebesar Rp487,61 miliar atau 48,07% lebih besar dari tahun sebelumnya sebesar Rp329,31 miliar. Beban lain-lain merupakan imbalan atas jasa penagihan, kerugian atas penyelesaian kredit bermasalah, cadangan litigasi risiko hukum, dan lainnya yang terdiri dari beban representasi, jamuan makan dan minum rapat dan beban terkait kebutuhan operasional. Selain itu, peningkatan beban operasional lainnya disebabkan oleh peningkatan premi program penjaminan pemerintah, gaji karyawan, serta beban umum dan administrasi.

Laba Operasional

Perseroan membukukan peningkatan laba operasional tahun 2023 sebesar 19,00% menjadi Rp4,54 triliun dari Rp3,81 triliun pada posisi tahun 2022. Peningkatan tersebut seiring dengan peningkatan pendapatan bunga dan bagi hasil serta pendapatan operasional lainnya pada tahun 2023 masing-masing sebesar Rp28,28 triliun dan Rp3,89 triliun.

Pendapatan (Beban) Bukan Operasional - Neto

Pada tahun 2023, Perseroan membukukan beban bukan operasional – neto tahun 2023 sebesar Rp159,52 miliar, berbanding terbalik dengan tahun sebelumnya yang mencatatkan pendapatan bukan operasional - neto sebesar Rp60,89 miliar. Hal tersebut terutama disebabkan oleh adanya kerugian kerugian dari revaluasi kurs, beban denda administrasi, kerugian jual beli mata uang asing, dan beban bina lingkungan.

Laba Sebelum Beban Pajak

Setelah laba operasional dikurang oleh beban bukan operasional – neto, Perseroan berhasil membukukan laba sebelum pajak tahun 2023 sebesar Rp4,38 triliun lebih besar dari tahun 2022 sebesar Rp3,88 triliun atau meningkat 13,02%. Peningkatan tersebut seiring dengan kenaikan pendapatan bunga dan bagi hasil serta pendapatan operasional lainnya.

Beban Pajak

Jumlah beban pajak tahun 2023 adalah sebesar Rp879,22 miliar, meningkat 5,85% dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar Rp830,62 miliar. Peningkatan beban pajak tersebut disebabkan karena adanya peningkatan laba sebelum pajak sebesar Rp504,52 miliar dari tahun 2022 sebesar Rp3,88 triliun menjadi Rp4,38 triliun pada tahun 2023.

Laba Tahun Berjalan

Perseroan membukukan jumlah laba tahun berjalan tahun 2023 adalah sebesar Rp3,50 triliun, mengalami peningkatan sebesar Rp455,92 miliar atau 14,97% dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp3,05 triliun. Peningkatan tersebut seiring dengan kenaikan pendapatan bunga dan bagi hasil serta pendapatan operasional lainnya.

Penghasilan Komprehensif Lain

Penghasilan komprehensif lain tahun 2023 adalah sebesar Rp347,73 miliar, meningkat dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar (Rp1,06) triliun. Hal tersebut dipengaruhi oleh keuntungan neto yang belum direalisasikan atas perubahan nilai

efek-efek dan obligasi pemerintah yang diukur pada nilai wajar melalui komprehensif lain.

Laba Komprehensif Tahun Berjalan

Perseroan berhasil membukukan laba penghasilan komprehensif tahun berjalan tahun 2023 sebesar Rp3,85 triliun, meningkat 94,01% dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp1,98 triliun. Peningkatan tersebut disebabkan karena adanya keuntungan neto yang belum direalisasikan atas perubahan nilai efek-efek dan obligasi pemerintah yang diukur pada nilai wajar komprehensif lain sebesar Rp517,53 pada tahun 2023 dan surplus revaluasi aset tetap sebesar Rp57,21 triliun.

Laba Per Saham

Jumlah laba per saham dasar tahun 2023 adalah sebesar Rp249, menurun 13,54% dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar Rp288. Peningkatan tersebut dipengaruhi peningkatan laba per saham yang merupakan hasil dari strategi korporasi dalam perbaikan dari sisi kualitas bisnis dan pengembangan bisnis ke area baru, mendorong Perseroan dapat meningkatkan laba bersih yang berdampak pada peningkatan laba per saham.

Laporan Arus Kas

Tabel Laporan Arus Kas

(dalam jutaan Rupiah)

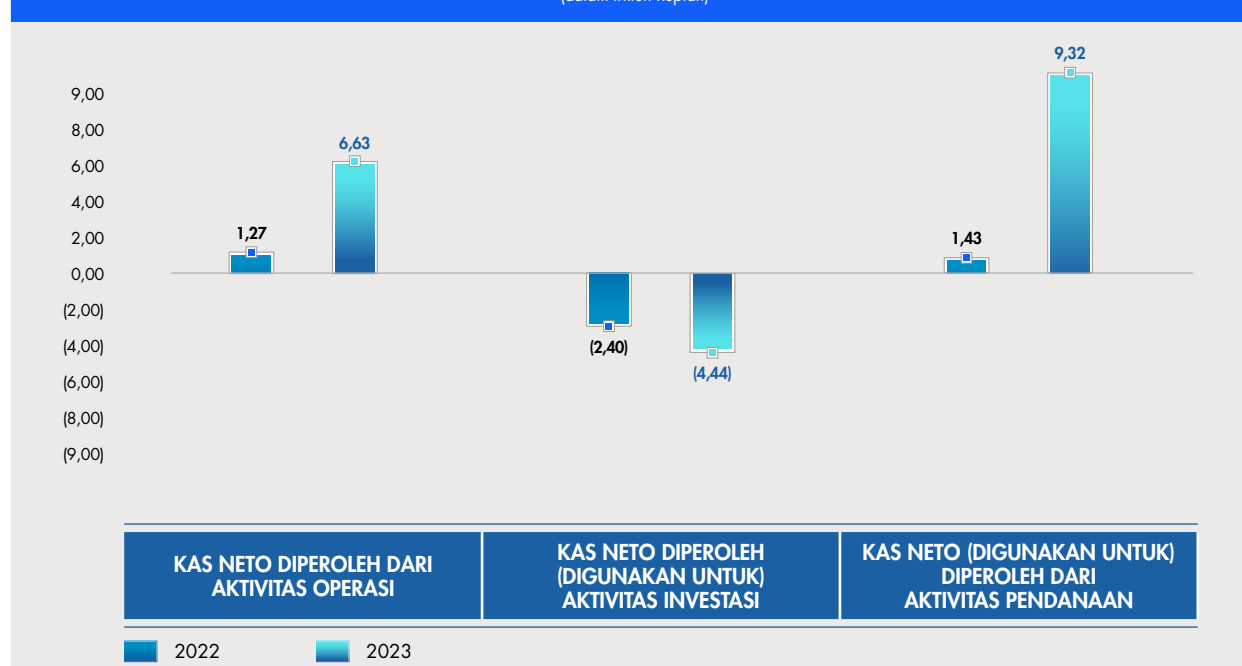
Uraian	2023	2022	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
ARUS KAS DARI AKTIVITASI OPERASI				
Penerimaan bunga, bagi hasil, dan marjin	27.618.186	24.331.326	3.286.860	13,51%
Penerimaan kredit yang telah dihapusbukukan	1.011.258	503.307	507.951	100,92%
Pembayaran bunga dan bonus, provisi dan komisi	(14.892.249)	(10.775.222)	(4.117.027)	38,21%
Pembayaran pajak penghasilan badan	(1.020.952)	(1.001.324)	(19.628)	1,96%
Penerimaan dari surat ketetapan pajak	-	402.428		
Beban operasional lainnya - neto	(5.790.828)	(6.896.183)	1.105.355	(16,03%)
Beban bukan operasional lainnya - neto	(54.382)	13.828	(68.210)	(493,27%)
Penerimaan kas sebelum perubahan aset dan liabilitas operasi	6.871.033	6.578.160	292.873	4,45%
Perubahan dalam aset dan liabilitas operasi:				
Penurunan (kenaikan) dalam aset operasi:				
Penempatan pada bank lain	-	-	-	-
Efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi	(246.380)	(104.885)	(141.495)	134,90%
Obligasi pemerintah untuk nilai wajar melalui laporan laba rugi	15.788.979	(4.955.939)	20.744.918	(418,59%)
Tagihan akseptasi	(124.005)	33.578	(157.583)	(469,30%)
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah	(38.484.306)	(26.318.471)	(12.165.835)	46,23%
Aset lain-lain	(785.307)	(196.503)	(588.804)	299,64%

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Kenaikan (penurunan) dalam liabilitas operasi:				
Liabilitas segera	74.415	(466.852)	541.267	(115,94%)
Simpanan dari nasabah				
Giro	24.468.372	31.538.044	(7.069.672)	(22,42%)
Giro Wadiah	4.814.656	3.268.857	1.545.799	47,29%
Tabungan	1.539.832	(10.617.072)	12.156.904	(114,50%)
Tabungan Wadiah	82.875	43.479	39.396	90,61%
Deposito berjangka	(5.504.388)	(322.562)	(5.181.826)	1606,46%
Simpanan dari bank lain	(45.095)	70.400	(115.495)	(164,06%)
Liabilitas akseptasi	124.005	(33.578)	157.583	(469,30%)
Liabilitas lain-lain	(4.184.154)	654.214	(4.838.368)	(739,57%)
Dana syirkah temporer	2.243.821	2.094.203	149.618	7,14%
Kas Neto diperoleh dari Aktivitas Operasi	6.634.353	1.265.073	5.369.280	424,42%
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				
Penerimaan saat jatuh tempo dari efek-efek biaya perolehan diamortisasi	(2.868.515)	199.964	(3.068.479)	(1.534,52%)
Penerimaan saat jatuh tempo dari efek-efek yang dimiliki hingga jatuh tempo	-	-	-	-
Perolehan aset tetap	(2.313.490)	(1.042.464)	(1.271.026)	121,93%
Penurunan efek-efek diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	(1.247.159)	381.580	(1.628.739)	(426,84%)
Penurunan (kenaikan) obligasi pemerintah diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	2.211.325	5.714.402	(3.503.077)	(61,30%)
Pembelian obligasi pemerintah pada biaya perolehan diamortisasi	(1.655.566)	(7.816.426)	6.160.860	(78,82%)
Pembelian efek-efek yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi	-	-	-	-
Penerimaan efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	45.031.457	165.683.898	(120.652.441)	(72,82%)
Pembelian efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	(43.597.267)	(165.520.488)	-	-
(Kenaikan) Penurunan efek-efek tersedia untuk dijual	-	-	-	-
Pembelian obligasi pemerintah yang dimiliki hingga jatuh tempo	-	-	-	-
Pembelian efek-efek yang dimiliki hingga jatuh tempo	-	-	-	-
Kas Neto diperoleh (digunakan untuk) Aktivitas Investasi	(4.439.215)	(2.399.534)	(2.039.681)	85,00%
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				
Penerimaan dari surat-surat berharga yang diterbitkan	2.449.019	1.541.330	907.689	58,89%
Pembayaran atas surat-surat berharga yang diterbitkan jatuh tempo	(2.769.764)	(5.263.000)	2.493.236	(47,37%)
Penerimaan atas efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	67.691.353	592.326	67.099.027	11.328,06%
Pembayaran atas efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali jatuh tempo	(67.691.353)	(592.326)	(67.099.027)	11.328,06%
Eksekusi opsi saham karyawan	-	-	-	-
Pembayaran dividen	(609.015)	(237.624)	(371.391)	156,29%
Penerimaan dari pinjaman yang diterima	11.185.162	11.814.826	(629.664)	(5,33%)
Pembayaran dari pinjaman yang diterima	(2.187.576)	(9.095.884)	6.908.308	(75,95%)

Uraian	2023	2022	Pertumbuhan	
			Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)/(3)
Penerimaan dari efek-efek subordinasi	-	-	-	-
Pembayaran liabilitas sewa	(81.973)	(84.983)	3.010	(3,54%)
Pembayaran atas pinjaman dan efek-efek subordinasi jatuh tempo	-	-	-	-
Dana Setoran Modal	1.330.093	2.756.575	(1.426.482)	(51,75%)
Kas Neto (digunakan untuk) diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	9.315.946	1.431.240	7.884.706	550,90%
KENAIKAN NETO KAS DAN SETARA KAS	11.511.084	296.779	11.214.305	3.778,67%
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	41.526.686	41.229.907	296.779	0,72%
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	53.037.770	41.526.686	11.511.084	27,72%

Grafik Laporan Posisi Keuangan

(dalam triliun Rupiah)



Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Perseroan membukukan kas neto dari aktivitas operasional sebesar Rp6,63 triliun pada tahun 2023, meningkat 424,42% dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai Rp1,26 triliun. Pencapaian yang lebih tinggi ini terutama dipengaruhi oleh peningkatan arus kas dari obligasi Pemerintah untuk nilai wajar melalui laporan laba rugi dan peningkatan arus kas pada liabilitas operasi deposito berjangka.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Perseroan membukukan kas neto untuk aktivitas investasi sebesar (Rp4,44 triliun) pada tahun 2023, dan pada tahun 2022 adalah sebesar (Rp2,40 triliun). Peningkatan kas neto untuk aktivitas

investasi dari tahun 2022 tersebut dipengaruhi oleh (pembelian) penerimaan saat jatuh tempo dari efek-efek yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, perolehan aset tetap, dan (pembelian) penerimaan saat jatuh tempo dari efek-efek biaya perolehan diamortisasi.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Perseroan membukukan kas neto dari aktivitas pendanaan sebesar Rp9,32 triliun pada tahun 2023, meningkat 550,90% dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai Rp1,43 triliun. Peningkatan kas neto dari aktivitas pendanaan ini dipengaruhi oleh kenaikan penerimaan dari surat-surat berharga yang diterbitkan.

Kemampuan Membayar Utang dan Kolektibilitas Piutang

Kemampuan Membayar Utang

Kemampuan membayar utang tercermin dari likuiditas dan solvabilitas Bank. Berkenaan dengan obligasi yang diterbitkan, kemampuan membayar utang tercermin dari lancarnya pembayaran bunga dan pemeringkatan efek yang diterbitkan. Selain itu, Perseroan memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur digunakan sebagai pedoman dalam melakukan pinjaman kepada kreditur. Tujuan dari kebijakan dimaksud adalah untuk menjaga terpenuhinya hak-hak dan menjaga kepercayaan kreditur terhadap Perseroan. Dalam kebijakan tersebut mencakup pertimbangan dalam melakukan perjanjian, serta tindak lanjut dalam pemenuhan kewajiban Perseroan Terbuka kepada kreditur. Kebijakan hak-hak dasar kreditur, antara lain adalah menerima pelunasan pokok dan pembayaran bunga pada waktu yang disepakati, memperoleh hak atas denda keterlambatan pelunasan pokok dan pembayaran bunga serta meminta keterangan, informasi, dan dokumen serta memeriksa pembukuan Perseroan. Untuk tahun 2023, terdapat 2 (dua) kreditur Perseroan yaitu kreditur pinjaman bilateral dan kreditur obligasi.

Kemampuan Perseroan membayar kewajiban atau utang dapat diukur dengan menggunakan rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio profitabilitas. Rasio-rasio tersebut akan menjadi parameter bagi Perseroan dalam menghitung kemampuan Perseroan menyediakan cadangan likuiditas.

Kemampuan Membayar Utang Jangka Pendek (Likuiditas Bank)

Kemampuan membayar utang jangka pendek salah satunya dapat diketahui melalui rasio likuiditas. Perseroan menggunakan beberapa parameter likuiditas yaitu Rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) dan Giro Wajib Minimum (GWM), *Loan to Deposit Ratio* (LDR) serta Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM).

Rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) Dan Giro Wajib Minimum (GWM)

Salah satu parameter utama dalam rasio likuiditas adalah pemenuhan rasio Giro Wajib Minimum (GWM). Perseroan menjaga GWM Utama dan GWM Sekunder yang pada tahun 2018 telah berubah menjadi Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM). PLM adalah cadangan likuiditas minimum dalam rupiah yang wajib dipelihara oleh Bank Umum dalam bentuk surat berharga yang memenuhi persyaratan. Hal tersebut berdasarkan PADG Nomor 22/11/PADG/2020 Perihal Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur

Nomor 21/22/PADG/2019 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 22/17/PBI/2020 Perihal Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/4/PBI/2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Tabel Rasio PLM dan GWM

(dalam %)

Kategori	Mata Uang	2023	2022	Kenaikan/Penurunan
Konvensional	Rupiah:			
	Utama (GWM)	6,04	8,28	(2,24)
	PLM	9,66	16,17	(6,51)
	Dolar AS	4,40	4,13	0,27
Syariah	Rupiah	6,10	7,76	(1,66)

Rasio GWM konvensional dalam mata uang rupiah tahun 2023 sebesar 6,04%, mengalami penurunan 2,24% dibandingkan tahun 2022 mencapai 8,28%, Penurunan rasio GWM dikarenakan adanya perubahan pemenuhan GWM yang dilakukan oleh regulator, yaitu berdasarkan PADG Nomor 24/8/PADG/2022 perihal Peraturan Pelaksanaan Pemenuhan Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Giro Wajib Minimum untuk UUS berdasarkan ketentuan adalah sebesar 7,5%, Perseroan mendapatkan insentif GWM

dari Bank Indonesia untuk sebesar 2,5%, sehingga kewajiban pemenuhan minimal GWM Syariah adalah 5,0%. Sedangkan GWM yang harus dijaga oleh Bank Umum Konvensional adalah sebesar 9%. Perseroan dapat mencapai target pertumbuhan kredit sektor prioritas, Perseroan mendapatkan insentif GWM dari Bank Indonesia sebesar 3,2%, sehingga kewajiban pemenuhan minimal GWM adalah 5,8%.

Demikian pula dengan rasio PLM yang menurun 6,51% menjadi 9,66% di tahun 2023. Hal tersebut antara lain dipengaruhi

berkurangnya posisi surat berharga yang termasuk kategori surat berharga yang diperhitungkan dalam ketentuan PLM. Sedangkan kenaikan posisi GWM valas dilakukan untuk mengoptimalkan excess likuiditas valas dalam rangka peningkatan pendapatan dengan tetap memperhatikan aturan yang berlaku sehingga membuat GWM valas meningkat 0,27% dari 4,13% di tahun 2022 menjadi 4,40% di tahun 2023.

Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM)

RIM merupakan bentuk penguatan dari *Loan to Funding Ratio* (LFR). RIM adalah rasio kredit yang diberikan kepada pihak ketiga dalam Rupiah dan valuta asing, tidak termasuk kredit kepada bank lain ditambahkan surat berharga yang dimiliki, terhadap:

1. Dana pihak ketiga yang mencakup giro, tabungan, dan deposito dalam Rupiah dan valuta asing, tidak termasuk dana antar bank.
2. Surat - surat berharga dalam Rupiah dan valuta asing yang memenuhi persyaratan tertentu yang diterbitkan oleh Perseroan.

Sesuai Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 20/4/PBI/2018 tanggal 29 Maret 2018, tentang "Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah" sebagaimana telah diubah dengan PBI Nomor 21/12/PBI/2019 tanggal 25 November 2019, PBI Nomor 22/17/PBI/2020 tanggal 30 September 2020, dan PBI Nomor 24/16/PBI/2022 tanggal 1 November 2022. Perbankan harus menjaga rasio RIM sebesar 84% sampai 94%. Pada tahun 2023, RIM Perseroan adalah sebesar 92,60%, meningkat dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 85,76%.

Perseroan juga mengelola cadangan likuiditas dalam bentuk *High Quality Liquid Asset* (HQLA) yang juga menjadi komponen likuiditas, yang ditetapkan dalam jumlah optimal dalam rentang di atas batas minimum HQLA setiap hari sebagai pendukung kebutuhan likuiditas Perseroan dan pemeliharaan GWM serta PLM yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia. Posisi *secondary reserve* Perseroan selalu terjaga di atas batas minimum *secondary reserve* selama tahun 2023.

Loan To Deposit Ratio (LDR)

LDR merupakan salah satu parameter untuk mengukur rasio likuiditas yang sehat. Rasio ini adalah perbandingan antara

jumlah kredit yang diberikan kepada pihak ketiga terhadap dana pihak ketiga (simpanan nasabah). LDR Perseroan di tahun 2023 sebesar 95,36%, naik 2,71% dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 92,65%. Hal tersebut disebabkan oleh adanya peningkatan penyaluran jumlah kredit dibandingkan dengan tahun 2022.

Kemampuan Membayar Utang Jangka Panjang (Solvabilitas Bank)

Rasio permodalan adalah salah satu parameter yang digunakan dalam mengukur rasio solvabilitas. Sesuai dengan komitmennya untuk menjalankan bisnis perbankan dengan prinsip kehati-hatian dan sesuai dengan regulasi yang berlaku, Perseroan memastikan Rasio Kecukupan Modal atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR) mampu memenuhi risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional.

Sesuai dengan peraturan Bank Indonesia (BI), Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM)/CAR yang ditetapkan untuk bank dengan profil risiko "2" adalah sebesar 9,18%. Jumlah modal untuk risiko kredit terdiri dari Modal Inti (*Tier I*) dan Modal Pelengkap (*Tier II*).

Jumlah modal Perseroan di tahun 2023 mencapai Rp31,23 triliun terdiri dari modal inti dan pelengkap masing-masing sebesar Rp27,15 triliun dan Rp4,07 triliun, sedangkan untuk tahun 2022 jumlah modal sebesar Rp28,17 triliun dengan modal inti dan pelengkap masing-masing senilai Rp22,53 triliun dan Rp5,64 triliun. Jumlah ATMR Perseroan tahun 2023 adalah sebesar Rp155,27 triliun, lebih tinggi dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp139,63 triliun. Rasio CAR tahun 2023 adalah sebesar 20,07% lebih rendah dibandingkan dengan rasio CAR tahun 2022 sebesar 20,17%.

Kemampuan Membayar Utang Dari Efek - Efek yang Diterbitkan

Kemampuan membayar utang juga dapat tercermin berdasarkan peringkat dari efek - efek yang diterbitkan Bank yaitu Obligasi. Efek - efek yang diterbitkan secara rutin dinilai oleh Lembaga Pemeringkat guna mendukung kelayakan efek. Kualitas efek sangat ditentukan oleh kemampuan perusahaan penerbit efek dalam membayar efeknya pada saat jatuh tempo dan kemampuannya membayar bunga atau kupon selama jangka waktu penerbitan efek tersebut.

Tabel Kemampuan Membayar Hutang dari Efek - Efek yang diterbitkan

Keterangan	Peringkat	
	2023	2022
BBTN Berkelanjutan II Tahap I 2015 Seri D	AA+(idn)	AA(idn)
BBTN Berkelanjutan III Tahap I 2017 seri C	AA+(idn)	AA(idn)
BBTN Berkelanjutan III Tahap I 2017 seri D	AA+(idn)	AA(idn)

Keterangan	Peringkat	
	2023	2022
BBTN Berkelanjutan III Tahap II 2019 seri C	AA+(idn)	AA(idn)
Junior Global Bond Bank BTN (USD)	Ba3	Ba3
BBTN Berkelanjutan IV Tahap I 2020 seri C	AA+(idn)	AA(idn)
BBTN Berkelanjutan IV Tahap II 2022 Seri A	AA+(idn)	AA(idn)
BBTN Berkelanjutan IV Tahap II 2022 Seri B	AA+(idn)	AA(idn)

Catatan:

- Rating efek - efek dalam negeri yang masih *outstanding* di tahun 2023 menggunakan *rating* dari Fitch.
- Rating efek - efek dalam negeri yang diterbitkan dan masih *outstanding* di tahun 2022 menggunakan *rating* dari Fitch.
- Rating Junior Global Bond Bank BTN (USD) yang diterbitkan di tahun 2020 menggunakan *rating* dari Moody's

Tabel Arti Peringkat Efek

Lembaga Pemeringkat	Peringkat	Arti Peringkat
Moody's	Ba3	Emiten dengan peringkat Ba memiliki <i>kekuatan finansial intrinsic</i> spekulatif, atau mandiri, dan tunduk pada risiko kredit yang substansial apabila tidak ada kemungkinan dukungan dari afiliasi atau Pemerintah.
Fitch Ratings Indonesia	AA	Peringkat Nasional AA menunjukkan ekspektasi tingkat risiko gagal bayar yang sangat rendah dibandingkan dengan emiten atau obligasi lain di negara atau serikat moneter yang sama. Risiko gagal bayar yang melekat hanya sedikit berbeda dari emiten atau obligasi dengan peringkat tertinggi di negara tersebut. Tanda Tambah (+) menunjukkan bahwa peringkat yang diberikan relatif kuat dan di atas rata-rata kategori yang bersangkutan.

Rasio Keuangan Lain

Untuk mengukur profitabilitas dan efisiensi kinerja Perseroan, rasio - rasio keuangan yang digunakan oleh perbankan adalah Laba sebelum pajak terhadap Aset atau *Return on Assets* (ROA),

Laba setelah pajak terhadap Ekuitas atau *Return on Equity* (ROE), Marjin Bunga Bersih atau *Net Interest Margin* (NIM), dan rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO).

Tabel Rasio Keuangan Lain

(dalam %)

Uraian	2023	2022	Kenaikan/Penurunan
<i>Return on Assets</i> (ROA)	1,07%	1,02%	0,05%
<i>Return on Equity</i> (ROE)	13,86%	16,42%	(2,56%)
<i>Net Interest Margin</i> (NIM)	3,75%	4,40%	(0,65%)
Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	86,10%	86,00%	0,10%

Pada tahun 2023, nilai ROA, ROE, dan NIM masing-masing adalah 1,07%, 13,86% dan 3,75% menunjukkan terdapat sedikit penurunan bila dibandingkan tahun 2022. Hal tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan persentase *cost of fund* atau beban bunga dana pihak ketiga Perseroan di tengah ketatnya kondisi likuiditas perbankan dan *right issue* yang dilakukan pada akhir tahun 2022 namun demikian Perseroan masih dapat menyalurkan kredit secara masif dan juga pendapatan yang diterima selain bunga meningkat signifikan yang pada akhirnya

ikut mendorong peningkatan laba bersih di tahun 2023 sebesar Rp3,50 triliun meningkat 14,97% dari tahun 2022.

Nilai BOPO tahun 2023 dapat dijaga pada posisi 86,10% sama dengan posisi tahun 2022 meskipun terdapat peningkatan beban bunga DPK namun Perseroan dapat melakukan efisiensi pada *overhead cost* sehingga dapat menjaga rasio BOPO tetap stabil di posisi ±86%.

Kolektibilitas Piutang

Tingkat kolektibilitas piutang bank dapat dilihat dari nilai rasio *Non Performing Loan* (NPL). Rasio NPL menjadi tolak ukur untuk melihat seberapa besar kredit yang bermasalah atau macet dari seluruh

kredit yang diberikan bank kepada nasabah. Semakin kecil nilai NPL, maka *performance* bank dalam kolektibilitas piutang semakin baik dan menunjukkan kualitas kredit yang baik.

Tabel Kolektibilitas

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2023		2022	
	Tanpa Segmen Syariah	Dengan Segmen Syariah	Tanpa Segmen Syariah	Dengan Segmen Syariah
Jumlah Kredit/ Pembiayaan yang Diberikan	296.583.860	333.698.141	266.657.565	298.281.704
<i>Performing Loan</i> (PL)	287.420.712	323.649.241	257.633.126	288.211.404
Lancar	263.614.334	297.250.597	239.577.162	268.076.929
Dalam Perhatian Khusus	23.806.378	26.398.644	18.055.964	20.134.475
<i>Non Performing Loan</i> (NPL)	9.163.148	10.048.900	9.024.439	10.070.300
Kurang Lancar	393.326	571.273	433.219	580.216
Diragukan	538.432	677.813	793.609	887.982
Macet	8.231.390	8.799.814	7.797.611	8.602.102
PL	96,91%	96,99%	96,62%	96,62%
NPL Gross	3,09%	3,01%	3,38%	3,38%
NPL Net	1,48%	1,32%	1,48%	1,32%

NPL Gross dengan segmen syariah tahun 2023 adalah sebesar 3,01%, membaik 0,37% dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar 3,38%. Kondisi tersebut disebabkan oleh peningkatan dari penyaluran kredit yang diberikan dan perbaikan kualitas kredit dari NPL menjadi PL.

Tabel Hapus Buku Kredit Macet

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2023		2022	
	Jumlah Debitur	Nilai Hapus Buku (dalam jutaan Rupiah)	Jumlah Debitur	Nilai Hapus Buku (dalam jutaan Rupiah)
Konvensional	11.099	2.705.785	8.196	2.497.801
Syariah	1.897	322.241	1.246	374.232
Jumlah	12.996	3.028.026	9.442	2.872.033



Suku Bunga Dana

Informasi suku bunga produk deposito, tabungan, dan giro Bank per 31 Desember tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel Suku Bunga Tabungan Rupiah

Jenis Produk	Strata Saldo	Suku Bunga Ritel	Suku Bunga Lembaga
Tabungan Investa	Sampai dengan Rp1 juta	0,00%	0,00%
	> Rp1 juta - Rp100 juta	1,00%	1,00%
	> Rp100 juta - Rp1 miliar	2,40%	2,25%
	> Rp1 miliar - Rp2 miliar	3,15%	3,05%
	> Rp2 miliar - Rp5 miliar	3,40%	3,20%
	> Rp5 miliar - Rp10 miliar	4,15%	3,45%
	> Rp10 miliar	4,15%	3,90%

Tabel Suku Bunga Tabungan Rupiah

Jenis Produk	Strata Saldo	Suku Bunga
Tabungan BTN Batara	< Rp1 juta	0,00%
	≥ Rp1 juta - ≤ Rp50 juta	0,10%
	> Rp50 juta - ≤ Rp500 juta	0,10%
	> Rp500 juta - ≤ Rp1 miliar	0,50%
	> Rp1 miliar - ≤ Rp2 miliar	1,00%
	> Rp2 miliar	1,00%
Tabungan BTN Bisnis	< Rp1 juta	0,00%
	≥ Rp1 juta - < Rp50 juta	0,50%
	≥ Rp50 juta - < Rp500 juta	1,00%
	≥ Rp500 juta - < Rp1 miliar	1,25%
	≥ Rp1 miliar	1,75%
Tabungan BTN Prima	≤ Rp5 juta	0,00%
	> Rp5 juta - Rp10 juta	0,00%
	> Rp10 juta - Rp100 juta	0,25%
	> Rp100 juta - Rp500 juta	0,50%
	> Rp500 juta - Rp2 miliar	0,75%
	> Rp2 miliar - Rp5 miliar	1,00%
	> Rp5 miliar	1,25%
Tabungan BTN Junior	≤ Rp50 ribu	0,00%
	> Rp50 ribu	0,50%
TabunganKu	Rp0 - Rp500 ribu	0,00%
	> Rp500 ribu - Rp1 juta	0,10%
	> Rp1 juta	0,25%

Jenis Produk	Strata Saldo	Suku Bunga
Tabungan SiMuda RumahKu	Sampai dengan Rp10 juta	1,00%
	> Rp10 juta - Rp25 juta	1,15%
	> Rp25 juta - Rp50 juta	1,25%
	> Rp50 juta - Rp100 juta	1,35%
	> Rp100 juta - Rp250 juta	1,50%
	> Rp250 juta	2,00%
Tabungan BTN Siap!	< Rp1 juta - Rp10 juta	1,00%
	> Rp10 juta - Rp25 juta	1,15%
	> Rp25 juta - Rp50 juta	1,25%
	> Rp50 juta - Rp100 juta	1,35%
	> Rp100 juta - Rp250 juta	1,50%
	> Rp250 juta	2,00%
Tabungan BTN e'BataraPos	< Rp1 juta	0,00%
	≥ Rp1 juta - Rp50 juta	0,10%
	> Rp50 juta - Rp500 juta	0,10%
	> Rp500 juta - Rp1 miliar	0,50%
	> Rp1 miliar	1,00%
Tabanas Batara Kantor Pos		0,00%

Tabel Suku Bunga Giro Rupiah

Jenis Produk	Strata Saldo	Suku Bunga
Giro Rupiah	≤ Rp10 juta	0,00%
	> Rp10 juta - Rp100 juta	0,25%
	> Rp100 juta - Rp500 juta	0,75%
	> Rp500 juta - Rp1 miliar	1,00%
	> Rp1 miliar	1,25%

Tabel Suku Bunga Deposito Rupiah

Jenis Produk	Strata Saldo	Jangka Waktu (bulan)						
		1	2	3	4	6	12	24
Deposito Rupiah	< Rp1 juta	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Rp1 juta - < Rp10 juta	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
	Rp10 juta - < Rp100 juta	2,25%	2,40%	2,65%	2,65%	2,90%	2,90%	2,90%
	≥ Rp100 juta - < Rp500 juta	2,40%	2,40%	2,90%	2,90%	3,05%	3,05%	3,05%
	≥ Rp500 juta - ≤ Rp2 miliar	2,40%	2,40%	2,90%	2,90%	3,05%	3,05%	3,05%
	> Rp2 miliar	2,40%	2,40%	2,90%	2,90%	3,05%	3,05%	3,05%



Tabel Suku Bunga e-Deposito Rupiah

Jenis Produk	Strata Saldo	Jangka Waktu (bulan)						
		1	2	3	4	6	12	24
e-Deposito Rupiah	< Rp100 juta	2,60%	2,75%	3,00%	3,00%	3,25%	3,25%	3,25%
	≥ Rp100 juta - < Rp500 juta	2,65%	2,75%	3,25%	3,25%	3,40%	3,40%	3,40%
	≥ Rp500 juta - < Rp2 miliar	4,25%	4,25%	4,40%	4,50%	4,65%	3,40%	3,40%
	≥ Rp2 miliar - < Rp5 miliar	4,50%	4,50%	4,65%	4,80%	4,90%	3,40%	3,40%
	≥ Rp5 miliar - < Rp10 miliar	4,60%	4,60%	4,80%	4,90%	5,00%	3,50%	3,50%
	≥ Rp10 miliar	4,70%	4,70%	5,00%	5,00%	5,00%	3,60%	3,60%

Tabel Suku Bunga Tabungan Valas

Jenis Produk	USD		SGD		AUD / CNY		JPY	
	Strata Saldo	Suku Bunga	Strata Saldo	Suku Bunga	Strata Saldo	Suku Bunga	Strata Saldo	Suku Bunga
Tabungan BTN Felas	< USD 1.000	0,00%	All tiering	0,10%	All tiering	0,05%	All tiering	0,00%
	USD 1.000 - < USD 10.000	0,15%						
	USD 10.000 - < USD 100.000	0,35%						
	≥ USD 100.000	0,50%						

Tabel Suku Bunga Tabungan Valas

Jenis Produk	USD	
	Strata Saldo	Suku Bunga
Tabungan BTN Felas USD via Mobile Banking	< USD 1.000	0,00%
	USD 1.000 - < USD 10.000	0,15%
	USD 10.000 - < USD 100.000	0,35%
	≥ USD 100.000	0,50%

Tabel Suku Bunga Deposito Valas

Jenis Produk	Strata Saldo	Jangka Waktu (bulan)					
		1	3	4	6	12	24
Deposito USD	Seluruh strata	0,20%					
Deposito SGD	Seluruh strata	0,10%					
Deposito AUD/CNY	Seluruh strata	0,10%					
Deposito JPY	Seluruh strata	0,00%					

Tabel Suku Bunga e-Deposito Valas

Jenis Produk	Strata Saldo	Jangka Waktu (bulan)						
		1	2	3	4	6	12	24
e-Deposito USD	< USD100.000	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
	USD100.000 - < USD500.000	2,50%	2,50%	1,50%	1,50%	1,50%	2,50%	2,50%
	USD500.000 - < USD1.000.000	2,50%	2,50%	2,00%	2,00%	2,00%	2,50%	2,50%
	≥ USD1.000.000	2,50%	2,50%	2,25%	2,25%	2,25%	2,50%	2,50%

Tabel Suku Bunga Giro Valas

Jenis Produk	Strata Saldo	Suku Bunga
Giro Valas (USD)	Sampai dengan USD100.000	0,00%
	> USD100.000	0,10%

Suku Bunga Dasar Kredit

Perseroan secara berkala memperbaharui Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) atau *Prime Lending Rate* sesuai dengan pergerakan suku bunga acuan yang ditetapkan Bank Indonesia. SBDK digunakan sebagai dasar penetapan suku bunga kredit yang akan dikenakan oleh Bank kepada Nasabah. SBDK belum

memperhitungkan komponen estimasi premi risiko yang besarnya tergantung dari penilaian Perseroan terhadap risiko masing-masing debitur atau kelompok debitur. Dengan demikian, besarnya suku bunga kredit dikenakan kepada debitur belum tentu sama dengan SBDK.

Tabel Suku Bunga Dasar Kredit

Uraian	SDBK Berdasarkan Segmen Bisnis				
	Kredit Korporasi	Kredit Ritel	Kredit Mikro	Kredit Konsumsi	
				KPR	Non KPR
Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) Tahun 2023	8,05%	8,30%	n/a	7,30%	8,80%
Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) Tahun 2022	8,00%	8,25%	n/a	7,25%	8,75%
Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) Tahun 2021	8,00%	8,25%	n/a	7,25%	8,75%
Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) Tahun 2020	9,90%	9,90%	n/a	9,95%	11,25%
Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) Tahun 2019	11,00%	11,25%	n/a	10,75%	11,50%

Analisis Kualitas Aset Produktif

Penilaian atau penyediaan aset produktif ditujukan untuk penyediaan dana dalam rangka memperoleh penghasilan, baik dalam bentuk kredit, surat berharga, penempatan dana antar bank serta bentuk penyediaan dana lainnya yang dipersamakan dengan itu. Posisi aset produktif pada kategori lancar tahun

2023 adalah sebesar Rp396,00 triliun meningkat 4,17% dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar Rp380,16 triliun. Dengan demikian, Perseroan memiliki kualitas aset produktif yang baik. Berikut adalah aset produktif Perseroan selama dua tahun terakhir.



Tabel Kualitas Aset Produktif

Uraian	2023						
	Lancar (L)	Dalam Perhatian Khusus (DPK)	Kurang Lancar (KL)	Diragukan (D)	Macet (M)	Jumlah	
Penempatan Pada Bank Lain	2.201.681	-	-	-	1.773	2.203.459	
Tagihan Spot dan Derivatif/Forward	32.176	-	-	-	-	32.176	
Surat Berharga Yang Dimiliki	41.093.303	50.696	4.644	5.769	45.390	41.199.802	
Surat Berharga Yang Dijual Dengan Janji Dibeli Kembali (Repo)	-	-	-	-	-	-	
Tagihan atas Surat Berharga Yang Dibeli Dengan Janji Dijual Kembali (Reverse Repo)	-	-	-	-	-	-	
Tagihan Akseptasi	544.567	-	-	-	-	544.567	
Kredit Yang Diberikan dan Pembiayaan Yang Diberikan	331.227.238	42.088.074	943.057	998.321	14.704.837	390.011.527	
Penyertaan Modal	-	-	-	-	-	-	
Tagihan Lainnya	-	-	-	-	-	-	
Komitmen dan Kontinjensi	20.853.385	517.162	7.343	318	168.460	21.546.668	
Agunan Yang Diambil Alih	-	-	-	-	-	77.591	

Tabel Cadangan Kerugian Penurunan Nilai dan Penyisihan Penilaian Kualitas Aset

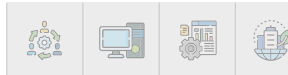
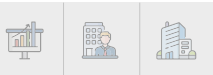
Pos-Pos	2023					
	Stage 1	Stage 2	Stage 3	Umum	Khusus	
Penempatan Pada Bank Lain	26	-	1.778	22.016	1.778	
Tagihan Spot dan Derivatif/Forward	-	-	-	322	-	
Surat Berharga Yang Dimiliki	22.903	-	-	46.978	51.507	
Surat Berharga Yang Dijual Dengan Janji Dibeli Kembali (Repo)	-	-	-	-	-	
Tagihan Atas Surat Berharga Yang Dibeli Dengan Janji Dijual Kembali (Reverse Repo)	-	-	-	-	-	
Tagihan akseptasi	1.447	22.429	-	5.446	-	
Kredit Yang Diberikan dan Pembiayaan Yang Diberikan	2.441.079	3.407.511	9.743.374	2.942.958	9.698.086	
Penyertaan Modal	-	-	-	-	-	
Tagihan Lainnya	-	-	-	-	-	
Komitmen dan Kontinjensi	3.580	-	-	25.993	25.858	

(dalam jutaan Rupiah)

	2022					
	Lancar (L)	Dalam Perhatian Khusus (DPK)	Kurang Lancar (KL)	Diragukan (D)	Macet (M)	Jumlah
	1.870.587	-	-	-	1.731	1.872.318
	103.939	-	-	-	-	103.939
	53.593.946	36.727	3.153	5.436	48.879	53.688.141
	-	-	-	-	-	-
	1.434.190	-	-	-	-	1.434.190
	420.562	-	-	-	-	420.562
	307.256.659	31.867.688	1.048.197	1.577.831	14.492.857	356.243.232
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	15.480.680	754.249	21.204	12.722	24.205	16.293.060
	-	-	-	-	77.591	77.591

(dalam jutaan Rupiah)

	2022				
	Stage 1	Stage 2	Stage 3	Umum	Khusus
	16	-	1.731	18.706	1.731
	-	-	-	1.039	-
	399	-	2	16.284	54.522
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	136	-	-	4.206	-
	3.014.067	3.525.156	9.135.700	2.663.032	9.246.776
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	4.719	-	-	16.711	37.712



Akselerasi Pertumbuhan *Fee Based Income*

Fee Based Income (FBI) atau Pendapatan Operasional Selain Bunga (POSB) juga menjadi sumber yang mendukung profitabilitas Perseroan. Pada tahun 2023, perolehan FBI Perseroan sebesar Rp4,07 triliun, dengan sumber utama yaitu pendapatan *treasury* Rp667 miliar, administrasi Rp778 miliar, *fee* dari transaksi dan layanan Rp542 miliar dan pendapatan lainnya (termasuk hapus buku) Rp2,08 triliun.

Adapun strategi yang dilakukan oleh Perseroan pada perolehan FBI adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan pendapatan *e-channel* dan *trade finance*.
2. Pendapatan atas layanan yang diberikan (*payment point*, *card business*, *servicing fee* sekuritisasi aset, *transfer*, bank garansi, *save deposit box*, *bancassurance*, layanan syariah dan jasa perbankan).
3. Meningkatkan pendapatan lainnya dengan mengoptimalkan bisnis *mortgage* melalui *kick back* asuransi dan *fee* atas penilaian agunan.
4. Meningkatkan penjualan kredit hapus buku, melalui percepatan *asset sales* dengan kerjasama investor, litigasi dan penjualan melalui portal rumah murah.
5. Membentuk unit kerja khusus yang mengelola *wholesale and transaction banking* untuk meningkatkan *wallet* dari segmen komersial, *wholesale* dan korporasi.
6. Mengembangkan *fee* dari segmen prioritas, terutama pada layanan valas (*market link deposit*, *deposito swap forex*, dan lain - lain).
7. Memperbaiki profitabilitas *treasury* dari pengelolaan *portfolio Available for Sale* (AFS) dan *Hold to Maturity* (HTM).
8. Meningkatkan *fee* yang bersumber dari Bank Garansi (BG), Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN), *Supply Chain Financing* (SCF), *Cash Management System* (CMS) di segmen Korporasi.

Pertumbuhan *Volume Transaksi Digital*

Untuk mengembangkan sumber pertumbuhan baru, Perseroan melakukan percepatan pengembangan layanan *digital* terutama yang menasar transaksi ritel melalui program akuisisi dan utilisasi BTN Mobile. Dengan program yang dijalankan, jumlah transaksi *digital banking* meningkat pesat yaitu menjadi 486 juta transaksi, atau naik 87% yoy. Sejalan dengan peningkatan jumlah transaksi, volume transaksi layanan *digital* juga naik menjadi Rp592 triliun, atau tumbuh 117% yoy. Dalam rangka mendukung pengembangan transaksi digital, pada tahun 2023 Perseroan juga melakukan pengembangan akuisisi QRIS. Pada tahun 2023, Perseroan memiliki 15.602 merchant QRIS dengan jumlah saldo merchant mencapai Rp1,29 triliun. Selain itu, Perseroan juga melakukan ekspansi aplikasi dan portal BTN Properti sebagai ekosistem perumahan digital.

Pada tahun 2023, portal dan aplikasi BTN Properti memiliki 515 ribu anggota (*member*), 9.249 pengembang (*developer*), dan 948 ribu stok rumah yang siap menjadi KPR. Perseroan melakukan inovasi teknologi salah satunya adalah dengan BTN Open API & Sandbox. Pada tahun 2023, Jumlah mitra yang sudah terintegrasi BTN Open API mencapai 14 mitra dengan total 849.354 hit.

Struktur Permodalan Bank

Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal dan Dasar Penentuan Kebijakan

Rencana Permodalan yang disusun Perseroan mengacu kepada kajian perkembangan ekonomi terkini, di samping berdasarkan kepada penelaahan dan penilaian atas kebutuhan kecukupan permodalan yang dipersyaratkan. Direksi dalam menyusun Rencana Permodalan yang merupakan bagian dari Rencana Bisnis Perseroan dan mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris. Perseroan merencanakan dan mengkaji bersama - sama secara rutin kebutuhan permodalan dengan didukung data - data analisis. Dalam perencanaan tersebut, Perseroan senantiasa menghubungkan tujuan keuangan dan kecukupan modal terhadap risiko sehingga bisnis Perseroan sejalan dengan permodalan dan persyaratan likuiditas Perseroan.

Tujuan dari kebijakan manajemen atas permodalan adalah untuk memastikan permodalan yang dimiliki Perseroan kuat dan mampu menciptakan struktur permodalan yang kuat untuk mendukung strategi pengembangan ekspansi usaha sekarang dan mempertahankan kelangsungan pengembangan di masa mendatang. Di samping itu, penetapan kebijakan permodalan ditujukan untuk pemenuhan ketentuan kecukupan permodalan yang ditetapkan oleh regulator serta memastikan agar struktur permodalan Perseroan telah efisien.

Sesuai POJK Nomor 11/POJK.03/2016 sebagaimana diubah dengan POJK RI Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum, modal Perseroan terdiri dari:

1. Modal Inti, yang terdiri dari Modal Inti Utama (*Common Equity Tier - CET 1*) dan Modal Inti Tambahan (*Additional Tier 1*). Modal inti utama mencakup modal disetor dan cadangan tambahan modal (*disclose reserve*). Cadangan tambahan modal terdiri atas faktor penambah (*agio*, cadangan umum, laba tahun lalu, laba tahun berjalan, dan opsi saham) dan faktor pengurang (*kerugian komprehensif lainnya dari transaksi aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual, selisih kurang Penyisihan Penghapusan Aset (PPA) atas aset produktif dengan cadangan kerugian penurunan nilai, dan PPA non produktif*).

2. Modal Pelengkap (Maksimum 100% dari Modal Inti) yang terdiri dari cadangan umum PPA atas aset produktif yang wajib dihitung dengan jumlah maksimum 1,25% dari ATMR Risiko Kredit dan Cadangan Tujuan.

Jumlah modal inti (*Tier I*) Perseroan di tahun 2023 adalah sebesar Rp27,15 triliun, lebih tinggi dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp22,53 triliun. Sedangkan jumlah modal pelengkap (*Tier II*) Perseroan di tahun 2023 sebesar Rp4,08 triliun lebih rendah dibandingkan modal pelengkap tahun 2022 sebesar Rp5,64 triliun.

Rincian Struktur Modal

Perseroan memiliki kemampuan permodalan yang kuat untuk mendukung pertumbuhan bisnis. Berikut adalah rincian struktur permodalan Perseroan.

Tabel Rincian Struktur Modal

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2023	2022	Kenaikan/Penurunan	
			Nominal	Persentase
I. MODAL INTI (<i>TIER 1</i>)	27.154.078	22.533.407	4.620.671	20,51%
1. Modal Inti Utama (<i>Common Equity Tier - CET 1</i>)	27.154.078	22.533.407	4.620.671	20,51%
1.1 Modal Disetor (Setelah dikurangi Saham <i>Treasury</i>)	7.017.222	5.295.000	1.722.222	32,53%
1.2 Cadangan Tambahan Modal	23.135.138	20.153.835	2.981.303	14,79%
1.3 Kepentingan Non Pengendali yang dapat diperhitungkan	-	-	-	-
1.4 Faktor Pengurang Modal Inti Utama	(2.998.282)	(2.915.428)	(82.854)	2,84%
2. Modal Inti Tambahan (<i>Additional Tier - AT 1</i>)	-	-	-	-
2.1 Instrumen yang memenuhi persyaratan AT - 1	-	-	-	-
2.2 <i>Agio/Disagio</i>	-	-	-	-
2.3 Faktor Pengurang Modal Inti Tambahan	-	-	-	-
II. MODAL PELENGKAP (<i>TIER 2</i>)	4.076.204	5.635.050	(1.558.846)	(27,66%)
1. Instrumen modal dalam bentuk saham atau lainnya yang memenuhi persyaratan <i>Tier 2</i>	2.367.557	4.206.070	(1.838.513)	(43,71%)
2. <i>Agio/Disagio</i>	-	-	-	-
3. Cadangan umum PPA aset produktif yang wajib dibentuk (paling tinggi 1,25% ATMR Risiko Kredit)	1.708.647	1.428.980	279.667	19,57%
4. Faktor Pengurang Modal Pelengkap	-	-	-	-
JUMLAH MODAL	31.230.282	28.168.457	3.061.825	10,87%



Uraian	2023	2022	Kenaikan/Penurunan	
			Nominal	Persentase
Aset Tertimbang Menurut Risiko				
ATMR untuk Risiko Kredit	136.691.761	114.318.357	22.373.404	19,57%
ATMR untuk Risiko Pasar	17.956.060	23.938.858	(5.982.798)	(24,99%)
ATMR untuk Risiko Operasional	942.326	1.373.299	(430.973)	(31,38%)
Jumlah ATMR	155.590.147	139.630.514	15.959.633	11,43%
Rasio KPMM sesuai Profil Risiko	9,18%	9,40%		
Rasio CET 1	17,45%	16,13%		
Rasio Tier 1	17,45%	16,13%		
Rasio Tier 2	2,62%	4,04%		
Rasio KPMM	20,07%	20,17%		

Ikatan Material Terkait Investasi Barang Modal

Pada tahun 2023, Perseroan melakukan ikatan material dengan pihak terkait dalam rangka investasi barang modal. Beberapa ikatan material dengan nilai signifikan disajikan dalam tabel berikut:

Tabel Ikatan Material Investasi Barang Modal

Nama Pihak yang Melakukan Ikatan	Jenis Ikatan	Nilai Ikatan (dalam jutaan Rupiah)
PT Binayasa Putra Batara	Pengadaan Jasa Kontraktor Pekerjaan Renovasi Gedung Pusdiklat Bank BTN Tanah Abang	30.500
PT Binayasa Putra Batara	Pengadaan Jasa Kontraktor Pekerjaan Pembangunan KC Cirebon	39.100
PT Neocelindo Intibeton	Pengadaan Jasa Kontraktor Pekerjaan Renovasi dan <i>Relayout</i> Seluruh Lantai Gedung KC Bekasi	29.800
PT Binayasa Putra Batara	Pengadaan Jasa Kontraktor Pekerjaan Renovasi Lantai 23 Menara BTN	15.550
PT Binayasa Putra Batara	Pengadaan Jasa Kontraktor Pekerjaan Basement Renovasi Gedung Pusdiklat Tanah Abang	12.475
PT Binayasa Putra Batara	Pengadaan Jasa Kontraktor Pekerjaan Renovasi Interior <i>Lobby</i> dan <i>Landscape</i> Keseluruhan Menara BTN	26.900
PT Metrocom Global Solusi	Pengadaan Perpanjangan <i>Software Lisensi Oracle</i> Untuk Aplikasi <i>E2E Procurement</i> Serta Aplikasi <i>Custodian</i>	37.000
PT Hanoman Cendekia Interaktif	Order Penggunaan Mandays Kontrak Payung <i>Middleware</i> 2023 - 2025 untuk Syariah <i>Virtual and Corporate Card Off Us sisi Middleware</i>	12.712
PT Mitra Integrasi Informatika	Pengadaan Pengembangan Master Data <i>Management</i>	15.984

Perseroan melakukan ikatan material untuk investasi barang dan modal dengan tujuan untuk mendukung kegiatan operasional Perseroan. Adapun sumber dana yang digunakan Perseroan dalam melakukan ikatan material berasal dari dana internal Perseroan. Dikarenakan mata uang yang digunakan untuk investasi barang modal adalah IDR atau Rupiah dan nilai pengadaan yang tercantum pada perjanjian kerja sama antara Perseroan dengan Penyedia juga ditetapkan dalam mata uang Rupiah maka tidak diperlukan adanya langkah yang direncanakan untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing

Investasi Barang Modal

Perseroan melakukan investasi barang modal dalam bentuk tanah, gedung/ruang kantor, bangunan lainnya, *hardware* komputer, mesin, kendaraan, perlengkapan kantor, aset tetap dan inventaris lainnya. Sampai dengan tahun 2023, jumlah investasi barang modal sebesar Rp12,16 triliun. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun 2022 yang disebabkan oleh

adanya pembelian tanah untuk kantor, pembelian dan renovasi gedung kantor, kendaraan dan berbagai peralatan kantor untuk menunjang operasional Perseroan.

Pada tahun 2023, Perseroan melakukan inventasi barang modal berupa pembelian 1 (satu) unit gedung bertingkat terdiri dari 28 lantai dan 2 *basement* dengan nilai Rp1,28 triliun, mencakup harga pembelian, Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan, dan pajak - pajak yang berlaku. Gedung tersebut terletak di Jalan H.R. Rasuna Said Nomor 01 RT. 001 RW. 006, Kelurahan Guntur Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan. Sebelumnya, gedung tersebut bernama Medialand Tower (dhl. Allianz Tower). Atas pembelian tersebut maka gedung akan berganti nama menjadi Menara 2 BTN. Saat ini secara laporan, investasi barang modal tersebut dicatat sebagai barang modal dalam bentuk bangunan lainnya dikarenakan legalitas kepemilikan masih proses balik nama oleh instansi yang berwenang dan juga sedang pengurusan proses pelaporan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk pemanfaatan gedung tersebut sebagai kantor fungsional Bank.

Tabel Investasi Barang Modal

(dalam jutaan Rupiah)

Jenis	Tujuan Investasi	Nilai Investasi	
		2023	2022
Tanah	Operasional Bisnis Bank	4.548.181	4.277.941
Gedung/Ruang Kantor	Operasional Bisnis Bank	1.860.085	1.730.108
Bangunan Lainnya	Operasional Bisnis Bank	1.404.960	69.763
Hardware Komputer	Operasional Bisnis Bank	3.050.055	2.465.335
Mesin	Operasional Bisnis Bank	504.278	481.161
Kendaraan	Operasional Bisnis Bank	49.298	43.685
Perlengkapan Kantor	Operasional Bisnis Bank	689.774	637.637
Aset Tetap dan Inventaris Lainnya	Operasional Bisnis Bank	47.973	45.993
Jumlah		12.154.605	9.751.623

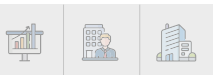
Komitmen dan Kontigensi

Saldo komitmen dan kontigensi pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel Komitmen dan Kontinjensi

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2023	2022
KOMITMEN		
Liabilitas Komitmen		
Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	18.933.652	15.109.981



Uraian	2023	2022
<i>Irrevocable L/C yang masih berjalan</i>	20.106	221.484
Komitmen - neto	18.953.758	15.331.465
KONTINJENSI		
Tagihan Kontinjensi		
Pendapatan bunga dalam penyelesaian	3.598.041	6.855.269
Liabilitas Kontinjensi		
Garansi yang diterbitkan	(2.579.175)	(948.495)
Kontinjensi - neto	1.018.866	5.906.774

Perjanjian Signifikan

Sepanjang tahun 2022 dan tahun 2023, Perseroan melaksanakan perjanjian signifikan sebagai berikut:

1. Pada tanggal 4 Desember 2023, Bank mengadakan perjanjian dengan PT Sinergy Informasi Pratama sehubungan dengan Pengadaan *Cash Recycle Machine* (CRM) Tahun 2023 dengan nilai kontrak sebesar Rp133.863 juta.
2. Pada tanggal 19 Desember 2023, Bank mengadakan perjanjian dengan PT Multipolar Technology Tbk sehubungan dengan Pengadaan Ulang PC *Desktop* dan *Notebook* Bank BTN dengan Skema Seat Management dengan nilai kontrak sebesar Rp115.980 juta.
3. Pada tanggal 8 Februari 2023, Bank mengadakan perjanjian dengan PT Multipolar Technology sehubungan dengan pengadaan peremajaan perangkat *network* dan standarisasi LAN Menara Bank BTN dengan nilai kontrak Rp39.575 juta.
4. Pada tanggal 3 Februari 2023, Bank mengadakan perjanjian dengan PT Binayasa Putra Batara sehubungan dengan Jasa Kontraktor Pekerjaan Pembangunan KC Cirebon dengan nilai kontrak Rp39.100 juta.
5. Pada tanggal 20 Februari 2023, Bank mengadakan perjanjian dengan PT Trees Solutions sehubungan dengan pengadaan ulang *Integrated End to End Procurement* dengan nilai kontrak Rp30.669 juta.
6. Pada tanggal 6 Januari 2023, Bank mengadakan perjanjian dengan PT Binayasa Putra Batara sehubungan dengan Jasa kontraktor pekerjaan renovasi Gedung Pusdiklat Bank BTN Tanah Abang dengan nilai kontrak sebesar Rp30.500 juta.
7. Pada tanggal 11 Juli 2023, Bank mengadakan perjanjian dengan PT Berkat Manunggal Energi sehubungan dengan pengadaan penggantian genset Gedung Menara BTN dengan nilai kontrak Rp 13.986 juta.
8. Pada tanggal 15 Maret 2023, Bank mengadakan perjanjian dengan PT Telekomunikasi Indonesia sehubungan dengan pengadaan perpanjangan sewa lokasi (*collocation*) *Data Center* Sentul tahun ketiga dengan nilai kontrak Rp10.638 juta.
9. Pada tanggal 16 Agustus 2023, Bank mengadakan perjanjian dengan PT Casa Prima Indonesia sehubungan dengan Jasa Kontraktor Renovasi Relokasi KC Kudus dengan nilai kontrak Rp7.495 juta.
10. Pada tanggal 4 September 2023, Bank mengadakan perjanjian dengan PT Casa Prima Indonesia sehubungan dengan Jasa Kontraktor Relayout dan Pembangunan Gedung Sentralisasi Ruang Dokumen Pokok Banyumanik dengan nilai kontrak Rp7.400 juta.
11. Pada tanggal 29 Agustus 2022, Bank mengadakan perjanjian dengan PT Surya Sudeco sehubungan dengan Pengadaan Sewa Mobil Operasional Bank BTN dengan nilai kontrak sebesar Rp77.830 juta.
12. Pada tanggal 4 Agustus 2022, Bank mengadakan perjanjian dengan PT Mitra Integrasi Informatika sehubungan dengan Pengadaan Paket License Microsoft Dukungan dan Layanan Pendukung Data Center dengan nilai kontrak sebesar Rp47.990 juta untuk jangka waktu selama tiga tahun.
13. Pada tanggal 22 Januari 2022, Bank mengadakan perjanjian dengan PT Swadharma Duta Data sehubungan dengan Pengadaan Perpanjangan Jasa Teknologi Informasi pada Outlet dengan nilai kontrak sebesar Rp27.663 juta untuk jangka waktu selama dua tahun dan pada tanggal 27 Februari 2023 merupakan perpanjangan tahun kedua dengan nilai kontrak Rp13.832 juta.
14. Pada tanggal 14 November 2022, Bank mengadakan perjanjian dengan PT Pesona Adi Batara sehubungan dengan Pengadaan Mobil operasional pejabat BTN tahun 2022 dengan nilai kontrak sebesar Rp21.500 juta.
15. Pada tanggal 20 Desember 2022, Bank mengadakan perjanjian dengan PT Dana Pensiun Bank BTN sehubungan dengan perpanjangan sewa gedung graha exitama lantai 2 sampai dengan 5 (*Learning Center* Tebet) sebesar Rp18.204 juta.
16. Pada tanggal 2 November 2022, Bank mengadakan perjanjian dengan PT Binayasa Putra Batara sehubungan dengan Jasa kontraktor renovasi lantai 6 Menara BTN dengan nilai kontrak sebesar Rp17.500 juta.

17. Pada tanggal 27 Mei 2022, Bank mengadakan perjanjian dengan PT Simian Solutions sehubungan dengan Pengadaan Pelaksana Sistem *Custodian Service* dengan nilai kontrak sebesar Rp17.000 juta.
18. Pada tanggal 21 Juli 2022, Bank mengadakan perjanjian dengan PT Sinergy Informasi Pratama sehubungan dengan Pengadaan *Firewall* untuk WAN DC Sentul dan DC Surabaya dengan nilai kontrak sebesar Rp11.550 juta untuk jangka waktu selama satu tahun.
19. Pada tanggal 16 Maret 2022, Bank mengadakan perjanjian dengan PT Hartekprima Litrindo sehubungan dengan Pengadaan Genset Peruntukan RBB 2022 dan Kebutuhan Non RBB dengan nilai kontrak sebesar Rp10.823 juta.
20. Pada tanggal 22 Juli 2022, Bank mengadakan perjanjian dengan PT Casa Prima Indonesia sehubungan dengan Pengadaan Jasa Kontraktor Renovasi KCS Makassar dengan nilai kontrak sebesar Rp9.850 juta.

Informasi dan Fakta Material Setelah Tanggal Laporan Akuntan

Sampai dengan akhir Laporan Tahunan disusun tidak terdapat uraian kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan termasuk dampaknya terhadap kinerja dan risiko usaha di masa mendatang.

Rincian Masalah yang Timbul Selama Tahun Buku yang Mempengaruhi Kegiatan Usaha BUMN

Pada tahun 2023, ekonomi Indonesia menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang kuat. Pada Triwulan II, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,17% *year-on-year* (yoy), mencerminkan penguatan mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi setelah pandemi. Selain itu, ekonomi global juga dalam pemulihan, dengan negara mitra dagang seperti Tiongkok dan India mengalami pertumbuhan yang kuat. Sektor manufaktur di Indonesia stabil, dan kredit perbankan tumbuh, terutama kredit investasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Sektor *real estate*, terutama perumahan, juga tumbuh berkat stimulus Pemerintah, termasuk pelonggaran rasio *Loan-to-Value* (LTV) dan *Financing-to-Value* (FTV) untuk properti. Bank Indonesia telah meningkatkan suku bunga acuan sebagai langkah *pre-emptive* untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mengendalikan inflasi. Meskipun inflasi tetap terkendali, kebijakan suku bunga selanjutnya akan sangat bergantung pada data ekonomi dan pasar keuangan. Bank Indonesia berencana mempertahankan suku bunga pada level tertentu hingga semester pertama tahun 2024 dan akan menyesuaikannya sesuai dengan perkembangan selanjutnya.

Pada tahun 2024, negara-negara berkembang seperti Indonesia dan India diperkirakan akan terus tumbuh, sementara ekonomi negara maju seperti Amerika Serikat dan Jepang diprediksi

akan tumbuh lebih lambat. Di Indonesia, pertumbuhan ekonomi dipacu oleh permintaan domestik yang membaik dan kinerja ekspor yang positif, serta dukungan dari Sektor Perumahan yang didorong oleh stimulus Pemerintah. Namun, tetap ada risiko seperti tekanan inflasi global, kenaikan suku bunga oleh The Fed dan ketidakpastian di pasar keuangan global. *International Monetary Fund* (IMF) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,0% pada tahun 2023 dan diproyeksikan stabil pada level tersebut pada tahun 2024. Di sisi perbankan, pertumbuhan kredit dan Dana Pihak Ketiga (DPK) juga mengalami perbaikan, mencerminkan pemulihan aktivitas ekonomi. KPR diharapkan terus tumbuh di tahun 2024, dengan *demand* yang tinggi dan stimulus perumahan yang mendukung.

Perkiraan asumsi ekonomi makro untuk tahun-tahun berikutnya mencakup pertumbuhan ekonomi yang stabil, inflasi yang terkendali, suku bunga yang diprediksi akan mengalami penurunan dan pertumbuhan kredit yang sehat, termasuk KPR dan sektor *real estate*. Selain itu, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) diharapkan stabil, mencerminkan upaya Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai tukar.

Bisnis Perseroan akan tetap berfokus pada sektor perumahan dan terkait dengan perumahan, karena sektor perumahan masih tetap menjadi sektor dengan potensi pertumbuhan yang tinggi seiring dengan meningkatnya permintaan dan jumlah *backlog* nasional. Beberapa data yang kami miliki menunjukkan beberapa informasi berikut:

- a. Sebaran *backlog* kepemilikan rumah terbesar terjadi di wilayah Jakarta dan Jawa Barat, kemudian menyusul wilayah Jawa Timur.
- b. Dari *backlog* kepemilikan rumah sebesar 12,7 juta, terdapat sekitar 10,7 juta yang berpotensi untuk diserap oleh perbankan.
- c. Secara demografis, *backlog* kepemilikan rumah tersebut sebagian besar berada pada rentang usia 24 hingga 40 tahun, dan memiliki pendapatan rata-rata Rp1,5 juta sampai Rp3,4 juta.
- d. Tantangan lainnya adalah rasio KPR terhadap PDB Indonesia yang sebesar 3%, masih lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara lain di ASEAN. Hal ini menandakan bahwa masih banyak potensi di sektor perumahan yang masih dapat dioptimalkan, sejalan dengan target pemerintah untuk meningkatkan rasio tersebut menjadi 4% pada akhir tahun 2024.
- e. Potensi yang masih sangat besar ini menjadi salah satu perhatian utama BTN dalam menangkap permintaan di sektor properti dan juga menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan bisnis.

Di sisa tahun 2023 dan 2024 mendatang, BTN tetap optimis akan terus dapat mencatatkan kinerja keuangan yang baik seiring dengan adanya beberapa regulasi baru yang terbit di tahun 2023. Dari sektor perumahan, Pemerintah baru melakukan penyesuaian terbaru atas batasan harga rumah subsidi untuk



tahun 2023 dan tahun 2024 dengan rata rata kenaikan sebesar 7% sejak akhir Juni 2023 dan 3% per 1 Januari 2024. Selain itu, Pemerintah baru saja mengeluarkan kebijakan PPN DTP terbaru di sektor properti untuk pembelian rumah dengan harga sampai dengan Rp5 miliar dengan insentif sebesar 100% untuk dasar pengenaan PPN DTP maksimal Rp2 miliar dari harga rumah tersebut sampai dengan Juni 2024 dan 50% untuk periode Juli - Desember 2024.

Terdapat juga Bantuan Biaya Administrasi (BBA) senilai Rp4 juta untuk rumah subsidi dengan maksimal harga Rp350 juta dari November 2023 – Desember 2024. Kebijakan terkait perumahan ini tentunya dapat menstimulus permintaan di sektor properti dan mendorong pertumbuhan kredit BTN sebagai bank yang berfokus di sektor tersebut. Selain itu, adanya insentif GWM dan rasio PLM diharapkan dapat memberikan tambahan likuiditas bagi BTN, yang nantinya dapat digunakan untuk penyaluran kredit, terutama di sektor perumahan. Selain itu, dengan POJK terbaru (POJK 12/2023) terkait *spin off* UUS, BTN akan mengikuti peraturan tersebut dan sedang dalam proses pengkajian terhadap berbagai opsi yang ada.

Merespon ketidakpastian global serta era suku bunga tinggi di sepanjang tahun 2023, BTN menghadapi beberapa tantangan dan juga peluang yang membuat BTN tetap dapat berkinerja positif.

- Hingga September 2023, telah terjadi kenaikan BI7DRRR sebesar 225 bps sejak kenaikan pertama kali pada Agustus 2022 yang memberikan tekanan pada beban bunga BTN. Per September 2023, beban bunga tumbuh 44% yoy, namun masih terkendali karena pertumbuhan beban bunga masih lebih rendah dibandingkan kenaikan BI7DRRR yang sebesar 64%.
- Selain kenaikan suku bunga acuan, likuiditas perbankan sepanjang tahun 2023 juga cukup ketat, terutama dengan diluncurkannya instrumen Operasi Pasar Terbuka BI yang baru, yaitu Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), SVBI, dan SUVBI. Akibat ketatnya likuiditas, terjadi peningkatan CoF yang menyebabkan penurunan NIM.

Di sisi lain, BTN terus berupaya menjawab tantangan tersebut dengan terus mempertahankan kinerja yang kuat dan mengembangkan lini bisnis lainnya:

- Per September 2023, kredit dan pembiayaan kembali tumbuh solid sebesar 9,9% yoy, sejalan dengan *guidance* tahun 2023, dan akan terus ditingkatkan dengan mendorong penyaluran kredit *high yield*.
- Pada September 2023, *fee based income* tumbuh 67,3% yoy dengan porsi FBI terhadap total pendapatan yang telah mencapai 10,2%, FBI menjadi sumber pendapatan tambahan bagi BTN untuk mengurangi ketergantungan pada aset yang sensitif terhadap suku bunga.
- Efisiensi di sisi operasional juga turut membaik, tercermin dari penurunan biaya operasional sebesar 5,6% yoy hingga September 2023.

- BTN juga secara aktif mengelola *cost of fund* melalui rekomposisi pendanaan yang sebelumnya sangat bergantung pada deposito komersial dan dialihkan ke dana ritel dan giro-giro operasional.

Prospek Usaha dan Strategi Ke Depan

Pada Januari 2024, World Bank menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia menurun ke level 2,4% untuk tahun 2024. Sementara Bank Indonesia memprakirakan ekonomi dunia melambat menjadi 2,8% pada 2024. Perkembangan tersebut didorong oleh tingkat inflasi di negara maju yang masih berada di atas target dengan tekanan yang mulai mereda. Dengan perkembangan inflasi ini, suku bunga kebijakan moneter termasuk *Federal Funds Rate* (FFR) diprakirakan tetap bertahan tinggi dalam jangka waktu yang lama (*higher for longer*). Meskipun demikian, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2024 diprediksi akan tetap kuat dan tumbuh positif dalam kisaran 4,8% - 5,2%. Kemudian tingkat inflasi di tahun 2024 diperkirakan akan melandai dibandingkan 2023 pada kisaran target Bank Indonesia yaitu 2,5%±1% yoy. Untuk mencapai tingkat inflasi tersebut, Pemerintah maupun Bank Indonesia akan melakukan bauran kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil. Sementara, rata - rata nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat (AS) diperkirakan di kisaran Rp15.500 pada akhir tahun 2024, dengan tetap memperhatikan ketidakpastian di pasar keuangan global seperti kebijakan moneter The Fed. Suku bunga acuan BI tetap dipertahankan pada level 6,00% di akhir tahun 2023 dan kemudian memulai penurunannya pada Semester II 2024. Sektor Jasa keuangan khususnya perbankan diprediksi akan tetap terjaga kinerjanya, kembali normal seperti sebelum pandemi. Diperkirakan pada tahun 2024 Dana Pihak Ketiga (DPK) akan tumbuh pada kisaran 8,0% - 9,0% dan penyaluran kredit perbankan akan tumbuh sebesar 10,0% - 12,0%.

Sektor perumahan masih memiliki ruang untuk tumbuh yang sangat besar mengingat masih tingginya angka *backlog* perumahan nasional dan tingginya jumlah masyarakat yang belum memiliki rumah yang layak. Hingga September 2023, total KPR mencatatkan pertumbuhan positif mencapai 12,66% yoy. Perpanjangan stimulus yang diberikan Pemerintah pada sektor perumahan, akan berdampak pada peningkatan permintaan akan rumah di tahun 2024. Pada akhir November 2023, pemerintah memberikan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk pembelian rumah baru dengan harga hingga Rp5 miliar dan membebaskan PPN 11% untuk rumah dengan nilai jual objek pajak maksimal Rp2 miliar, yang berlaku hingga Juni 2024. Sedangkan untuk periode Juli hingga Desember 2024, Pemerintah akan memberikan diskon PPN sebesar 50%. Insentif PPN DTP ini diperkirakan akan menjadi pendorong utama terhadap permintaan perumahan sepanjang tahun 2024. Selain itu, stimulus juga diberikan oleh Bank Indonesia yaitu pelonggaran rasio LTV/FTV Kredit/ Pembiayaan Properti menjadi maksimal 100% untuk semua jenis properti yang berlaku hingga Desember 2024.

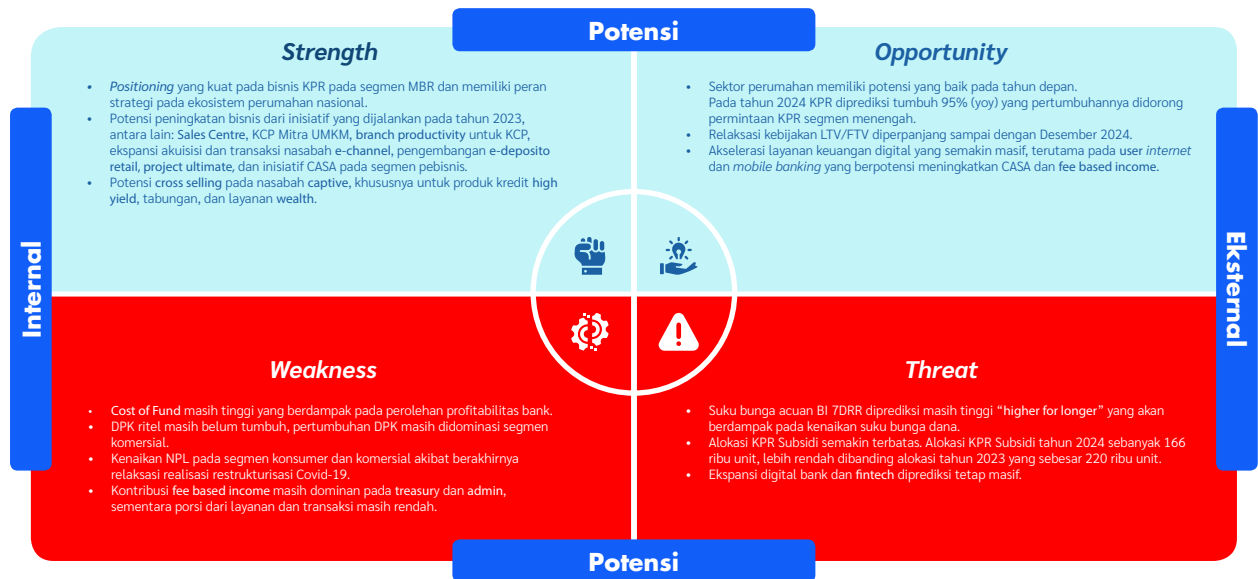
Di tahun 2024, daya beli masyarakat diperkirakan akan meningkat seiring perbaikan ekonomi nasional dan penyelenggaraan Pemilu. Harga jual rumah juga diperkirakan akan meningkat secara merata didukung oleh perkembangan infrastruktur, perbaikan ekonomi nasional, serta sentimen positif terhadap keberhasilan penyelenggaraan Pemilu. Hal ini juga didukung oleh hasil riset *House Price Index (HPI)* Perseroan pada Triwulan III - 2023, pertumbuhan harga rumah masih terus

menguat sebesar 8,66% yoy. Pertumbuhan HPI ini didukung oleh pertumbuhan di semua tipe rumah yaitu rumah tipe kecil ($21 \text{ m}^2 - 36 \text{ m}^2$), rumah tipe menengah ($37 \text{ m}^2 - 45 \text{ m}^2$) dan tipe besar ($46 \text{ m}^2 - 70 \text{ m}^2$).

Sumber:

- *Global Economic Prospects*, World Bank, Januari, 2024
- Pertemuan Tahunan Bank Indonesia, 2023
- Siaran Pers Otoritas Jasa Keuangan, 2023.

Mempertimbangkan perkembangan dinamika ekonomi makro, industri perbankan serta industri perumahan, Perseroan melakukan analisa daya saing melalui analisis *Strength, Weakness, Opportunity, Threat* (SWOT) sebagai berikut:



Memperhatikan analisa SWOT tersebut, disusun matriks *Threat Opportunity Weakness Strength* (TOWS) sebagai berikut:





Berdasarkan hal-hal yang telah dijabarkan di atas, Perseroan yakin memiliki prospek usaha yang sangat baik di masa yang akan datang. Sesuai dengan *Road Map Corporate Plan* tahun 2021-2025. *Transformation journey* Perseroan pada tahun 2024-2025 adalah "*Disrupt and Scaleup Through Digital*" yang dijabarkan sebagai berikut:



Pencapaian Target dan Target Ke Depan

Pencapaian Target 2023

Perbandingan Target dan Realisasi Produksi/Operasional

Beberapa indikator pencapaian target operasional dapat ditunjukkan dengan pencapaian beberapa target yaitu target kredit dan pembiayaan, serta target perolehan Dana Pihak Ketiga (DPK).

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Produksi/Operasional

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Realisasi 2023	Target 2023	Pencapaian
1	2	3	4=2/3
Kredit dan Pembiayaan			
Kredit Perumahan	248.030.689	249.369.957	99,46%
Kredit Non Perumahan	48.553.170	44.673.004	108,69%
Jumlah Kredit	296.583.860	294.042.962	100,86%
Jumlah Pembiayaan	37.114.281	35.784.542	103,72%
Jumlah Kredit dan Pembiayaan yang diberikan	333.698.141	329.827.503	101,17%
Dana Pihak Ketiga			
Giro	143.534.817	135.150.320	106,20%
Tabungan	44.471.996	49.346.763	90,12%
Deposito	161.926.504	162.628.342	99,57%
Jumlah Dana Pihak Ketiga	349.933.317	347.125.425	100,81%

Kredit perumahan di tahun 2023 sebesar Rp248,03 triliun tercapai 99,46% dari target tahun 2023, hal ini salah satunya disebabkan oleh kondisi ekonomi yang masih dalam proses

pemulihan pasca Covid-19 dan juga strategi Perseroan dalam mengembangkan bisnis produk-produk *high yield* seperti KAR, KRING dan KUR, sehingga secara keseluruhan kredit dan

pembiayaan Perseroan masih dapat melampaui target tahun 2023 yang tercapai 101,17% dari target tahun 2023.

Jumlah dana pihak ketiga di tahun 2023 sebesar Rp349,93 triliun tercapai 100,81% dari target 2023. Pencapaian tersebut di dukung oleh pencapaian giro di tahun 2023. Giro di tahun 2023 sebesar Rp135,15 triliun tercapai 106,20% dari target tahun 2023, pencapaian giro tersebut dikontibusi oleh peningkatan giro pada segmen *wholesale*, komersial, korporasi dan institusi.

Deposito di tahun 2023 sebesar Rp162,63 triliun tercapai 99,57% dari target tahun 2023, ketidaktercapaian tersebut lebih disebabkan oleh strategi Perseroan dalam melakukan *shifting*

dana mahal kepada dana murah sehingga dapat menekan peningkatan *cost of fund* di tengah kondisi ketatnya likuiditas perbankan dan suku bunga tinggi.

Tabungan di tahun 2023 sebesar Rp49,34 triliun tercapai 90,12%, ketidaktercapaian tersebut disebabkan ketatnya kondisi likuiditas perbankan khususnya Bank dalam kategori BUKU III namun posisi tabungan Perseroan masih dapat tumbuh secara yoy sebesar 5,40%.

Perbandingan Target dan Realisasi Keuangan

Pencapaian keuangan dapat dilihat dari pencapaian posisi keuangan, rasio - rasio keuangan, pendapatan dan laba.

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

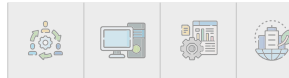
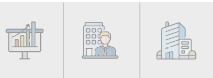
Uraian	Realisasi 2023	Target 2023	Pencapaian
1	2	3	4=2/3
Posisi Keuangan			
Aset	438.749.736	430.947.850	101,81%
Liabilitas	381.164.489	401.402.327	94,96%
Ekuitas	30.479.152	29.545.523	103,16%
Pendapatan dan Laba			
Pendapatan Bunga	28.281.252	27.729.313	101,99%
Laba Operasional	4.539.729	4.014.398	113,09%
Laba Bersih	3.500.988	3.053.724	114,65%
Rasio Keuangan			
CAR	20,07%	19,44%	103,24%
NPL	3,01%	3,45%	87,25%
ROA	1,07%	0,95%	112,63%
ROE	13,86%	12,16%	113,98%
NIM	3,75%	3,89%	96,40%

Aset di tahun 2023 sebesar Rp441,79 triliun, dengan capaian 101,81% di atas target. Pencapaian tersebut disebabkan oleh surat berharga yang dimiliki, kredit/piutang/pembiayaan yang diberikan dan DPK berhasil melampaui target yang ditetapkan. Capaian ekuitas di tahun 2023 sebesar 103,16% dengan realisasi Rp30,48 triliun. Ekuitas yang lebih kuat pada tahun 2023 didukung oleh profitabilitas yang lebih baik sehingga meningkatkan saldo laba pada tahun tersebut.

Realisasi pendapatan bunga di tahun 2023 sebesar Rp28,28 triliun dengan capaian 101,99% di atas target, pencapaian tersebut disebabkan oleh perbaikan kualitas kredit dan strategi Perseroan dalam ekspansi kredit *high yield*. Demikian pula dengan laba operasional di tahun 2023 yang berhasil melampaui target 113,09% dengan realisasi Rp4,54 triliun, pencapaian tersebut disebabkan oleh berhasilnya strategi Perseroan dalam memperbaiki kualitas kredit, ekspansi kredit *high yield* dan optimalisasi pendapatan operasional selain

bunga. Sejalan dengan pencapaian laba operasional, laba bersih di tahun 2023 terealisasi sebesar Rp3,50 triliun dengan capaian 114,65% yang berhasil melampaui target yang ditetapkan, pencapaian tersebut disebabkan oleh berhasilnya strategi Perseroan dalam memperbaiki kualitas kredit, ekspansi kredit *high yield* dan optimalisasi pendapatan operasional selain bunga. Laba di tahun 2023 ini merupakan laba terbesar sepanjang sejarah Perseroan berdiri.

Dari sisi rasio keuangan, CAR di tahun 2023 sebesar 20,07% dengan capaian 103,24% di atas target, pencapaian tersebut dikontibusi oleh peningkatan laba, penambahan modal inti yang didapat dari *rights issue* dan kemampuan Perseroan dalam mengelola portofolio surat berharga yang dimiliki sehingga tidak memiliki kerugian mtm yang signifikan. NPL di tahun 2023 sebesar 3,01%, lebih baik dibandingkan target yang sebesar 3,45%. Hal tersebut didorong oleh inisiatif perbaikan proses bisnis seperti implementasi *Commercial Banking Center* (CBC),



Regional Loan Processing Center (RLPC) sehingga proses kredit menjadi lebih *prudent* dan juga *asset sales* yang dilakukan secara periodik. ROA, ROE dan NIM di tahun 2023 masing-masing sebesar 1,07%, 13,86%, dan 3,75% pencapaian

tersebut didukung oleh peningkatan laba Perseroan pada tahun 2023, peningkatan pendapatan operasional selain bunga dan efisiensi pada *overhead cost*.

Perbandingan Target dan Realisasi Struktur Modal

Pencapaian struktur modal di tahun 2023 diuraikan sebagai berikut.

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Struktur Modal

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Realisasi 2023	Target 2023	Pencapaian
1	2	3	4=2/3
Modal Inti (Tier 1)	27.154.078	26.499.859	102,47%
Modal Inti Utama (Common Equity Tier - CET 1)	27.154.078	26.499.859	102,47%
Modal Inti Tambahan (Additional Tier - AT 1)	-	-	-
Modal Pelengkap (Tier 2)	4.076.204	3.902.802	104,44%
Jumlah Modal	31.230.282	30.402.662	102,72%
Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)	155.590.147	156.392.874	99,49%
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM)	20,07%	19,44%	103,24%

Modal Inti (Tier 1) di tahun 2023 sebesar Rp27,15 triliun dengan capaian 102,47% di atas target, ketercapaian tersebut disebabkan oleh potensi keuntungan/kerugian nilai surat berharga yang dimiliki dapat ditekan seminimum mungkin. Modal Pelengkap (Tier 2) di tahun 2023 juga terealisasi sebesar Rp4,07 triliun dengan capaian 104,44% di atas target. Ke depannya Perseroan akan tetap menjaga komposisi Modal Inti (Tier 1) yang optimal untuk mendukung peningkatan kapasitas bisnis.

Perbandingan Target dan Realisasi Pemasaran

Brand awareness (tingkat tahu bank) masyarakat terhadap brand Perseroan menjadi indikator pencapaian strategi pemasaran di tahun 2023. Adapun metode yang dilakukan dalam mendapatkan peringkat indeks persepsi masyarakat terhadap brand Perseroan, yakni melalui survei secara langsung kepada responden pada 9 (sembilan) kota besar di Indonesia oleh lembaga survei independen dengan pertimbangan citra bank secara *bankwide*, produk tabungan, dan *e-channel*, menghasilkan sebagai berikut:

Tabel Bank Rapid Reaction Monitor (BRRM) – 9 (sembilan) Kota

Tingkat Awareness	Peringkat (Score)	
	2023 (TW IV)	2022
Bankwide	6 (36)	7 (36)
Tabungan	5 (19)	5 (22)
E-Channel (Mobile Banking)	7 (11)	8 (9)

Berdasarkan hasil studi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa brand Perseroan mengalami peningkatan peringkat pada awareness secara *bankwide* maupun secara produk *e-channel* (BTN Mobile), sedangkan tingkat awareness tabungan BTN masih bertahan di peringkat 5 (lima).

Perbandingan Target dan Realisasi Pengembangan SDM

Pencapaian pengembangan SDM dapat tercermin pada jumlah pelatihan, peserta dan biaya yang digunakan selama tahun berjalan.

Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Pengembangan SDM

Uraian	Realisasi 2023	Target 2023	Pencapaian
1	2	3	4=2/3
Biaya Pengembangan SDM (Rp juta)	95.928	97.050	98,84%
Jumlah Pelatihan (pelatihan)	206	175	117,71%
Jumlah Peserta Pelatihan (orang)	308.229	280.320	109,96%

Sepanjang tahun 2023, Perseroan telah melakukan pengembangan SDM melalui program pembelajaran dan pengembangan seluruh pegawai dengan metode *Classroom*, *Virtual Classroom* dan *Self Learning*. Persentase pencapaian jumlah peserta pembelajaran dan pengembangan sampai dengan Bulan Desember 2023 mencapai 109,96% atau di atas target yang telah ditentukan.

Target Ke Depan

Perseroan telah menyusun target ke depan sesuai dengan dokumen RKAP tahun 2024. Penetapan target tersebut didasarkan pada beberapa asumsi makro sebagai berikut:

Tabel Asumsi dalam Menyusun Proyeksi

Asumsi Makro	2024
Pertumbuhan PDB (% yoy)	5,10
Suku Bunga Acuan BI 7 Days Repo (%)	5,50
Inflasi (%)	2,9
Nilai Tukar (Rp/USD)	15.500
Pertumbuhan Kredit (%)	9,50
Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (%)	8,00

Sumber: Analisis Chief Economist Bank BTN

Proyeksi Produksi/Operasional

Proyeksi produksi/operasional untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel Proyeksi Produksi/Operasional

(dalam %)

Uraian	Proyeksi Pertumbuhan 2024
Kredit dan Pembiayaan	
Kredit Perumahan	8% - 10%
Kredit Non Perumahan	30% - 32%
Jumlah Kredit	10% - 12%
Jumlah Pembiayaan	13% - 5%
Jumlah Kredit dan Pembiayaan yang diberikan	10% - 12%
Dana Pihak Ketiga	
Giro	8% - 10%
Tabungan	21% - 23%
Deposito	11% - 13%
Jumlah Dana Pihak Ketiga	11% - 13%



Proyeksi Keuangan

Proyeksi keuangan untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel Proyeksi Keuangan

(dalam %)

Uraian	Proyeksi Pertumbuhan 2024
Posisi Keuangan	
Aset	9% - 11%
Liabilitas	9% - 11%
Ekuitas	7% - 9%
Pendapatan dan Laba	
Pendapatan Bunga	11% - 13%
Laba Operasional	14% - 16%
Laba Bersih	10% - 12%
Rasio Keuangan	
CAR	19% - 20%
NPL	< 3,00%
ROA	1% - 2%
ROE	13% - 15%
NIM	4% - 5%

Proyeksi Struktur Modal

Proyeksi struktur modal untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel Proyeksi Struktur Modal

(dalam %)

Uraian	Proyeksi Pertumbuhan 2024
Modal Inti (Tier 1)	(5%) - 7%
Modal Inti Utama (Common Equity Tier - CET 1)	(5%) - 7%
Modal Inti Tambahan (Additional Tier - AT 1)	-
Modal Pelengkap (Tier 2)	58% - 60%
Jumlah Modal	2% - 4%
Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)	3% - 5%
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)	(0%) - 1%

Proyeksi Kebijakan Dividen

Informasi proyeksi kebijakan dividen adalah sebagai berikut:

Tabel Dividen

Uraian	Proyeksi 2024	Realisasi		
		2023	2022	2021
Rencana Permodalan				
1. Laba Bersih	3.607	3.419	3.045	2.376
2. Dividend Pay Out (DPO)	721	684	609	238
3. Rasio DPO	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%

Perseroan memperoleh dividen yang berasal dari pembagian laba bersih. Jumlah dividen tergantung kebijakan dividen (*dividend policy*) yang diterapkan.

Pada tahun 2024, strategi *campaign* akan berfokus pada *Rebranding Logo* Perseroan serta peningkatan aktivasi dan transaksi BTN Mobile melalui peningkatan tabungan, baik dari sisi peningkatan *Number of Account* (NoA) maupun *Volume of Account* (VoA), melalui optimalisasi strategi *360 campaign*. Di samping itu, *Plus by BTN Prioritas*, BTN Bisnis dan *Internet Banking Business* (IBB), BTN Spekta 2024, serta KPR BTN (Subsidi dan Non Subsidi) termasuk dalam *campaign plan* 2024 sebagai upaya peningkatan realisasi dana pihak ketiga (baik ritel maupun lembaga), serta peningkatan realisasi kredit pembiayaan.

Primary

- Jan
- Feb: **REBRANDING BANK BTN**
- Mar
- Apr
- Mei
- Jun
- Jul
- Agst
- Sep
- Okt
- Nov
- Des

Secondary

- POM 1: **BTN mobile & TABUNGAN TRANSAKSIONAL**
- POM 2: **Plus**, **BTN BISNIS & INTERNET BANKING BUSINESS**, **BTN spekta**, **Plus**, **KPR BTN BERSUBSIDI**

Festive Campaign

- Ke-74 BTN: **Festive HUT Ke-74 BTN**
- Idul Fitri: **Festive Ramadan Idul Fitri**
- Ke-78 BTN: **Festive HUT Ke-78 BTN**
- Ke-48 KPR BTN: **Festive HUT Ke-48 KPR BTN**

Always On

- Produk dan Promo E-Channel BTN (BTN Mobile, IB dan ATM)
- Produk dan Promo Kartu Debit BTN Visa
- Tabungan BTN Bataara dan BTN Slap!
- Tabungan BTN Bisnis dan IBB
- KPR dan BTN Properti
- BTN Spekta
- Layanan dan Program BTN Prioritas
- Produk dan Program KPR Non Subsidi, KPR Subsidi, KAR dan KRING
- Produk Pembiayaan Kredit Komersial
- Produk dan Program Syariah
- Produk dan Program KUR serta KUMK
- Produk, Program dan Jasa Bank BTN Lainnya
- Corporate Communication
- Festive
- Government Communication

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sep	Okt	Nov	Des
HGCTHI FEST											
Market Outlook & Launching New Debit Card BTN 	HUT Ke-74 BTN 	Jakarta BTN Anniversary Festival 	Bandung Roadshow BTN Jakarta International Marathon (BTN JIM) 	Semarang BTN JIM (Event Day) 	Surabaya	Medan	Balikpapan BTN Property Expo di 6 Kota 	Palembang MotoGP Mandalika Series 	Makasar	Denpasar BTN JWF (Wedding and Housing Expo) 	HUT Ke-48 KPR BTN
Chinese New Year (CNY) Jakarta dan Surabaya 	Launching New BTN (Logo, Tower dan New Card)	Tabungan BTN Bisnis Ramadan 	Mudik Bersama BUMN	BTN Property Expo di 6 Kota 	Konser Shiela On 7 					Joyland Festival 	



Proyeksi Pengembangan SDM

Proyeksi pengembangan SDM tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel Proyeksi Pengembangan SDM

Uraian	Proyeksi 2024
Biaya Pengembangan SDM (Rp juta)	104.190
Jumlah Pelatihan (pelatihan)	210
Jumlah Peserta Pelatihan (orang)	290.775

Evaluasi Rencana Jangka Panjang (RJP)

Perseroan memiliki *Corporate Plan* 2021-2025, Perseroan senantiasa melakukan evaluasi terhadap rencana jangka panjang (*Corporate Plan* 2021-2025). *Review* dan evaluasi rencana jangka panjang dilakukan setiap tahun oleh Direksi dan Dewan Komisaris. Pada tahun 2023, *review* dan evaluasi rencana jangka panjang telah dilakukan pada Rapat Direksi maupun Rapat

Direksi dan Dewan Komisaris setiap bulan. Evaluasi rencana jangka panjang dilakukan untuk melihat kesesuaian rencana dalam upaya mencapai visi BTN yaitu menjadi *The Best Mortgage Bank in Southeast Asia* pada tahun 2025. Hasil evaluasi rencana jangka panjang ini menjadi pedoman dan pertimbangan dalam menyusun RKAP tahun 2024.

The Best Mortgage Bank in South East Asia Pada Tahun 2025			
	Ukuran Visi dan Milestone Aspirasi Corporate Plan Tahun 2021-2025	Pencapaian Tahun 2023	Key Metrics Tahun 2025
	Meningkatkan <i>low cost funding</i> 2 kali lipat menjadi Rp270 triliun	<i>Cost of Fund</i> 3,7%	<i>Cost of Fund</i> 3,9%
	Mendorong keterjangkauan akses perumahan bagi lebih dari 6 juta masyarakat Indonesia	Unit KPR 588 Ribu	Unit KPR 1,5 Juta
	Membangun <i>one stop shop financial solution</i> untuk 3 juta konsumen terkait perumahan	Rasio FBI 12,6%	Rasio FBI 12,5%
	Menjadi inovator <i>digital</i> dan <i>home of Indonesia's best talent</i>	CIR 46,3%	CIR 46,0%
	Membangun portofolio berkualitas tinggi dengan tingkat NPL yang rendah	NPL Gross 3,0%	NPL Gross 3,0%
	Profitabilitas yang tinggi dan berkelanjutan dengan ROE~20%	ROE 13,5%	ROE 19,8%

Dalam mendukung pencapaian strategis di tahun 2025 mendatang, Perseroan telah menetapkan 3 (tiga) fokus utama

inisiatif strategis yang terdiri dari inisiatif di bidang *Funding*, *Lending* dan *Enabler* (*Human Capital*, *Operation*, *Finance*).

35 initiatives implemented in 2023 	FUNDING: Retail, Institutional and Wholesale					
	1. Mengembangkan <i>Channel electronic</i> serta Aktivasi <i>Transaction Banking Retail</i> (Mobile Banking, EDC, QRIS, dan Channel terkaitnya)	2. Mengembangkan strategi akuisisi/aktivasi nasabah retail pada channel (Mobile Banking, EDC, QRIS, dan Channel terkaitnya)	3. Membangun <i>Operational Risk Readiness and Fraud Risk Strategy</i>	4. Mengembangkan produk dan aktivasi <i>transaction banking retail</i>	5. Mengembangkan strategi aktivasi nasabah retail	6. Mengembangkan CASA di segmen pebisnis
	7. Peningkatan Penjualan Transaksi Valas dan Surat Berharga dengan Nasabah	8. Mengembangkan Bisnis <i>Trade Finance</i> dan Bank Garansi	9. Menyusun <i>Road Map Transaction Banking</i>	10. Implementasi <i>Single Relationship Model</i> Segmen Korporasi		
	LENDING: KPR, Personal Loan, SME, Asset Management					
	1. Membangun Bisnis Model KPR untuk Segmen <i>Emerging Affluent</i>	2. Mengembangkan <i>alternative proxy income model</i> untuk meningkatkan <i>approval rate</i>	3. Optimalisasi <i>Sales Channel</i> untuk penawaran <i>personal loan</i> melalui digital (New Mobile Banking/BTN Property) dan Telesales	4. Membangun bisnis <i>High Yield Loan</i> di segmen kredit <i>consumer</i>	5. Perluasan Bisnis <i>High Yield Loan</i> untuk SME	6. Menyusun Strategi <i>Collection</i> untuk Segmen SME
	7. Melakukan Sentralisasi proses kredit SME di Sentra Proses UMKM	8. Implementasi <i>new business process</i> SME dan SME <i>Decision Engine</i>				
	ENABLER: Human Capital, Operations, Finance					
	1. Mengembangkan HCBP untuk menyelaraskan strategi HC dengan Bisnis serta menjawab kebutuhan Bank	2. Menyempurnakan struktur organisasi HC dan merancang sistem <i>grading</i> yang selaras dengan kebutuhan bisnis	3. Perbaikan lebih lanjut untuk meningkatkan <i>operational excellence</i> dan praktik manajemen SDM	4. Implementasi strategi <i>multi-sourcing</i> dan menjalankan <i>program on boarding</i> untuk <i>new recruit</i> dan <i>internal movement</i>	5. Menerapkan metodologi dan matriks pengukuran produktivitas yang sistematis untuk segmen bisnis dan support	6. Mengimplementasikan prinsip dan tata kelola manajemen kinerja yang terintegrasi serta menerapkan penilaian kinerja multi sumber untuk memastikan objektivitas menyeluruh
	7. Menyelaraskan sistem remunerasi dan program insentif untuk menarik, mempertahankan dan memotivasi pegawai	8. Mempertajam <i>learning strategy</i> , penerapan <i>coaching</i> secara konsisten serta melakukan intervensi untuk mendukung budaya pembelajaran	9. Menjalankan manajemen suksesi untuk memastikan pemenuhan posisi kunci/kritikal dan menutup <i>generation gap</i>	10. Mengaktivasi 4 Pilar EVP: <i>Learn, Grow, Contribute, dan Engagement</i> dalam mendorong peningkatan branding Bank BTN	11. Meningkatkan internalisasi budaya AKHLAK dan empat pilar budaya Bank BTN melalui optimasi <i>Change Agent Networks</i> dan Program Budaya yang berkesinambungan	12. Mengimplementasikan HCIS yang terintegrasi untuk mendukung operasional <i>excellence</i> , pengambilan keputusan berbasis data. Serta menyediakan <i>seamless employee experience</i>
	13. Implementasi perencanaan tenaga kerja yang prediktif dan berbasis pada produktivitas	14. <i>Rollout-record</i> (Sentralisasi dan Digitalisasi) di 30 KC	15. Pengembangan <i>Profitability Measurement System</i>	16. Menerapkan struktur SBU untuk membangun organisasi yang digerakkan oleh kinerja	17. Kajian/Rebranding Bank BTN	

Pada tahun 2023 sesuai dengan fase *Transformation Journey* Perseroan pada tahun 2023 yaitu "Disrupsi Digital Untuk Menguasai Ekosistem Perumahan". Perseroan berhasil melampaui target laba yang ditetapkan, laba bersih di tahun 2023 terealisasi sebesar Rp3,50 triliun dengan pertumbuhan

14,97% (yoy), peningkatan tersebut disebabkan oleh berhasilnya strategi Perseroan dalam memperbaiki kualitas kredit, ekspansi kredit *high yield* dan optimalisasi pendapatan operasional selain bunga. Laba di tahun 2023 ini merupakan laba terbesar sepanjang sejarah Perseroan berdiri.

Kebijakan, Pengumuman dan Pembayaran Dividen

Kebijakan Dividen

Dasar Kebijakan Pembagian Dividen dilakukan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) atau Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) berdasarkan Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Besarnya dividen Perseroan jumlahnya akan ditentukan pada saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Faktor - faktor yang menjadi pertimbangan dalam penentuan jumlah dan pembayaran dividen di antaranya adalah tingkat kesehatan

keuangan, tingkat kecukupan modal, kebutuhan dana untuk ekspansi usaha lebih lanjut, tanpa mengurangi hak dari RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Berdasarkan hal - hal tersebut, kecuali ada alasan - alasan lain yang mendasar, manajemen merencanakan pembayaran dividen tunai minimum 20% dari laba bersih setiap tahunnya.

Pengumuman dan Pembayaran Dividen

Informasi terkait pengumuman dan pembayaran dividen tahun buku 2022 - 2021 disajikan sebagai berikut.

Tabel Pengumuman dan Pembayaran Dividen Tahun Buku 2022 - 2021

Uraian	Tahun Buku 2022	Tahun Buku 2021
Laba Bersih (Rp)	3.045.071.859.198	2.376.225.756.803
Dividen Kas	609.014.371.840	237.622.575.680
Dividen Non Kas *)	-	-
Jumlah Saham (lembar)	14.034.444.413	10.590.000.000
Dividen Kas Per Saham (Rp)	43,39	22,43



Uraian	Tahun Buku 2022	Tahun Buku 2021
Dividen Non Kas Per Saham *)	-	-
Dividend Pay Out Ratio (%)	20	10
Tanggal Pengumuman	17 Maret 2023	04 Maret 2022
Tanggal Pembayaran Dividen Kas	14 April 2023	31 Maret 2022
Tanggal Pembayaran Dividen Non Kas*)	-	-

Keterangan: *) Perseroan tidak memiliki Dividen Non Kas

Pengumuman dan Pembayaran Dividen Tahun Buku 2022

Di tahun 2023, Perseroan membagikan dividen tunai tahun buku 2022 sesuai dengan hasil keputusan RUPS Tahunan di tahun 2023 tanggal 16 Maret 2023. Berdasarkan RUPS Tahunan tahun 2023, Pemegang Saham memutuskan menyetujui dan menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2022 sebesar Rp3.045.071.859.198 (tiga triliun empat puluh lima miliar tujuh puluh satu juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh delapan Rupiah) sebagai berikut:

- Sebesar 20% (dua puluh persen) atau Rp609.014.371.840 (enam ratus sembilan miliar empat belas juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus empat puluh Rupiah) sebagai dividen tunai kepada para Pemegang Saham yang akan dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Dividen bagian Pemerintah Republik Indonesia atas kepemilikan 60% (enam puluh persen) saham sebesar Rp365.408.623.104 (tiga ratus enam puluh lima miliar empat ratus delapan juta enam ratus dua puluh tiga ribu seratus empat Rupiah), akan disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara dalam mata uang Rupiah.
 - Dividen Pemegang Saham Lainnya atas kepemilikan 40% (empat puluh persen) saham publik sebesar Rp243.605.748.736 (dua ratus empat puluh tiga miliar enam ratus lima juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh enam Rupiah) akan dibayarkan kepada pemegang saham secara proporsional sesuai dengan kepemilikan saham.
 - Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen tahun buku 2022 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Sebesar 80% (delapan puluh persen) atau Rp2.436.057.487.358 (dua triliun empat ratus tiga puluh enam miliar lima puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh

tujuh ribu tiga ratus lima puluh delapan Rupiah) sebagai saldo laba ditahan.

Pengumuman dan Pembayaran Dividen Tahun Buku 2021

Di tahun 2022, Perseroan membagikan dividen tunai tahun buku 2021 sesuai dengan hasil keputusan RUPS Tahunan di tahun 2022 tanggal 02 Maret 2022. Berdasarkan RUPS Tahunan tahun 2022, Pemegang Saham memutuskan menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2021 sebesar Rp2.376.225.756.803 (dua triliun tiga ratus tujuh puluh enam miliar dua ratus dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh enam ribu delapan ratus tiga rupiah) sebagai berikut:

- Sebesar 10% (sepuluh persen) atau Rp237.622.575.680 (dua ratus tiga puluh tujuh miliar enam ratus dua puluh dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus delapan puluh rupiah) ditetapkan sebagai dividen tunai kepada para Pemegang Saham yang akan dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Khusus dividen bagian Pemerintah atas kepemilikan 60% (enam puluh persen) saham sebesar Rp142.573.545.408 (seratus empat puluh dua miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus empat puluh lima ribu empat ratus delapan puluh rupiah) akan disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara.
 - Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen Tahun Buku 2021 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Sebesar 90% (sembilan puluh persen) atau Rp2.138.603.181.123 (dua triliun seratus tiga puluh delapan miliar enam ratus tiga juta seratus delapan puluh satu ribu seratus dua puluh tiga rupiah) ditetapkan sebagai saldo laba ditahan.

Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

Sepanjang tahun 2023 tidak dilaksanakan penerbitan Obligasi sehingga tidak terdapat kewajiban bagi Perseroan untuk melaporkan dana hasil Obligasi. Namun, terdapat penambahan modal melalui mekanisme *rights issue*/privatisasi dengan PMN sebesar Rp2.479.999.977.600,- ditambah dengan dana dari

publik sebesar Rp1.653.333.318.000 seluruhnya disetorkan ke dalam Modal Bank BTN setelah dikurangi dengan biaya emisi. Informasi lebih rinci terkait penambahan modal melalui mekanisme *rights issue*/privatisasi disajikan pada bagian Laporan Penyertaan Modal Negara (PMN).

Informasi Material Mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Penggabungan/Peleburan Usaha, Akuisisi, Restrukturisasi Hutang dan Modal

Perseroan memiliki aturan dan prosedur yang mengatur akuisisi, pengambil alihan, dan transaksi luar biasa seperti merger dan penjualan aset korporasi yang substansial sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Kebijakan Umum Nomor KU.4 Tentang Pengelolaan Perusahaan Anak dan Unit Usaha Syariah untuk memastikan transaksi terjadi secara transparan dan dalam kondisi yang wajar dan melindungi hak-hak semua pemegang saham sesuai dengan kelasnya.

Investasi

Sebagai salah satu kegiatan usaha di industri perbankan, Perseroan melakukan investasi dalam bentuk efek bersifat utang, baik yang diterbitkan oleh Pemerintah maupun korporasi. Berikut

disampaikan rincian investasi dalam bentuk efek – efek bersifat utang yang dilakukan Perseroan per 31 Desember 2023 dan 2022:

Tabel Investasi Efek-Efek

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Nilai	
	2023	2022
Nilai wajar melalui laba rugi	4.838.453	20.385.030
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainnya	14.440.327	14.988.242
Biaya perolehan diamortisasi	21.921.022	18.314.868
Total efek - efek	41.199.803	53.688.141

Sepanjang tahun 2023 Unit Usaha Syariah (UUS) telah melakukan investasi dalam bentuk obligasi dengan total akumulasi sebesar Rp126,29 triliun. Pada tahun yang sama atas investasi obligasi tersebut yang telah jatuh tempo atau telah dilakukan pencairan sebesar Rp116,70 triliun.

Ekspansi

Pada tahun 2023 Perseroan melalui *Procurement & Fixed Asset Management Division* (PFAD) telah melakukan ekspansi dari sisi pengadaan dan pengelolaan aset tetap sebagai berikut:

1. Tanggal 18 Desember 2023, pembelian gedung bertingkat yang terdiri dari 28 lantai dan 2 *basement* senilai Rp1,28 triliun yang terletak di Jalan H.R. Rasuna Said Nomor 01 RT.001 RW.006, Kelurahan Guntur Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan. Selanjutnya, gedung tersebut dinamakan Gedung Menara 2 BTN dan menjadi kantor operasional Divisi Bisnis, Kantor Wilayah, dan Kantor Cabang.
2. Tanggal 14 September 2023, pembelian gedung kantor berupa ruko senilai Rp3,33 miliar yang terletak di Komp. BSD, Ruko Sektor VII E Blok K Jl. Raya Serpong, Tangerang. Bangunan tersebut terletak berdampingan dengan Kantor Cabang Bumi Serpong Damai (KC BSD) dan dioperasikan sebagai perluasan bangunan KC BSD.
3. Tanggal 10 November 2023, pembelian gedung kantor berupa ruko senilai Rp1,27 miliar yang terletak di Jl. D.I. Panjaitan Km. 9 Komplek Plaza Bintan Center Blok Bunga, Tanjung Pinang Provinsi Riau Kepulauan. Bangunan tersebut terletak berdampingan dengan Kantor Cabang Tanjung Pinang dan dioperasikan sebagai perluasan bangunan KC Tanjung Pinang.
4. Tanggal 13 Desember 2023, pengadaan tanah tanah senilai Rp80 miliar yang terletak di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Selanjutnya, tanah tersebut dilakukan pengurusan izin - izin untuk pembangunan gedung kantor cabang.
5. Tanggal 20 Desember 2023, pengadaan dan instalasi genset baru untuk Gedung Menara BTN senilai Rp14,8

miliar. Genset baru tersebut menggantikan genset lama yang sudah beroperasi selama 30 tahun.

6. Tanggal 4 April 2023, dimulai pekerjaan revitalisasi dan renovasi gedung Pusdiklat Bank BTN yang terletak di Jalan KH. Mas Mansyur Nomor 86 Tanah Abang, Jakarta Pusat dengan nilai Rp33,8 miliar. Selanjutnya, gedung tersebut akan dioperasikan sebagai Kantor Pusat UUS Perseroan.
7. Tanggal 22 November 2023, dimulai pekerjaan untuk pemanfaatan tanah milik Perseroan yang terletak di Jalan Raya Gandul – Cinere, Kota Depok yang memiliki luas ±5 Ha. Tanah tersebut akan dikembangkan menjadi BTN ECOPARK, dan rencananya akan berdiri gedung *record center*, gedung arsip, gedung *data center*, gedung pusdiklat dan Kantor Cabang Pembantu. *Progress* pengembangan berada pada tahapan pematangan lahan.

Sepanjang tahun 2023 Perseroan telah melakukan ekspansi dari sisi pengembangan jaringan kantor dengan menambahkan Kantor Cabang Syariah (KCS) sejumlah 2 (dua) Kantor (KCS Jember, KCS Pontianak), selanjutnya Perseroan juga melakukan pembukaan terhadap jaringan Kantor Cabang Pembantu (KCP) Konvensional sejumlah 7 (tujuh) Kantor (KCP Soreang, KCP Kawasan Industri Sentul, KCP Pasar Tanah Abang Blok A, KCP RS Bhayangkara Kediri, KCP Manna, KCP Barabai dan KCP Wonosobo). Selain KCP Konvensional Perseroan juga melakukan pembukaan terhadap KCP Syariah (KCPS) sejumlah 4 Kantor (KCPS Rangkasbitung, KCPS Solok, KCPS Batang dan KCPS Bantul. Secara total, jumlah jaringan kantor Perseroan tahun 2023 terdiri dari 6 (enam) Kantor Wilayah, 81 KC Konvensional, 34 KC Syariah, 541 KCP Konvensional dan 75 KCP Syariah.



Divestasi

Sepanjang tahun 2023, Perseroan tidak melakukan kegiatan divestasi.

Penggabungan/Peleburan Usaha

Sepanjang tahun 2023, Perseroan tidak melakukan kegiatan penggabungan/peleburan usaha.

Akuisisi

Sepanjang tahun 2023, Perseroan tidak melakukan kegiatan akuisisi.

Restrukturisasi Hutang dan Modal

Sepanjang tahun 2023, Perseroan tidak melakukan kegiatan restrukturisasi utang dan modal.

Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi dengan Pihak Afiliasi

Transaksi Material adalah setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali yang memenuhi batasan nilai transaksi sama dengan 20% (dua puluh persen) atau lebih dari ekuitas Perusahaan Terbuka (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha).

Transaksi Benturan Kepentingan

Sesuai ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan, Benturan Kepentingan adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis perusahaan terbuka dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham Utama, atau Pengendali yang dapat merugikan Perusahaan Terbuka dimaksud.

Kegiatan usaha Perseroan tidak terlepas dari hubungan dan interaksi antar individu di lingkungan Perseroan maupun dengan pihak - pihak lainnya, terdapat potensi benturan kepentingan yang mungkin tidak dapat terhindarkan antara satu pihak dengan pihak lainnya, sehingga dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan dan kinerja hasil keputusan tersebut yang dapat

merugikan bagi Perseroan. Perseroan menyadari pentingnya sikap yang tegas terhadap pengendalian dan penanganan benturan kepentingan yang terjadi di lingkungan Perseroan, sehingga dapat tercipta pengelolaan bisnis yang efektif dalam mencapai tujuan Perseroan, bebas dari segala bentuk tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan hubungan yang harmonis dengan seluruh pemangku kepentingan.

Perseroan senantiasa mematuhi ketentuan yang berlaku dalam hal transaksi yang mengandung benturan kepentingan, sebagaimana yang tertuang dalam dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. Dari sisi internal, Perseroan memiliki Kebijakan Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana yang diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi dan Dewan Komisaris. Adapun kebijakan penyediaan dana kepada pihak terkait yang mengandung benturan kepentingan tercantum dalam Peraturan Direksi tersendiri yang mengatur bahwa Perseroan dilarang memberikan dana kepada pihak terkait tanpa persetujuan Dewan Komisaris.

Dalam hal terjadi benturan kepentingan antara Perseroan dengan pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif dan/atau pihak lainnya yang terkait dengan Perseroan maka anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perseroan dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan tersebut dalam setiap keputusan. Perseroan juga mendokumentasikan dengan baik setiap mengungkapkannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengungkapan benturan kepentingan dituangkan dalam risalah rapat sekurang-kurangnya mencakup nama pihak yang memiliki benturan kepentingan, masalah pokok benturan kepentingan dan dasar pertimbangan pengambilan keputusan tersebut.

Pada prinsipnya setiap insan Perseroan menghindari pengambilan keputusan yang memiliki situasi dan kondisi adanya benturan kepentingan. Pemberian kredit kepada Direksi, Dewan Komisaris dan pegawai Perseroan dilakukan berdasarkan batas kewajaran dan sesuai dengan peraturan Perseroan yang berlaku tanpa membedakan dengan nasabah lainnya (*arm's length basis*).

Sepanjang tahun 2023, tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

Tabel Transaksi Benturan Kepentingan

Nama	Jabatan	Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi	Keterangan
Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

Transaksi Afiliasi

Berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan, Afiliasi adalah:

1. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
2. Hubungan antara pihak dengan Pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
3. Hubungan antara 2 (dua) Perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
4. Hubungan antara Perusahaan dan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
5. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
6. Hubungan antara Perusahaan dan Pemegang Saham Utama.

Selanjutnya transaksi Afiliasi adalah setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali dengan Afiliasi dari perusahaan terbuka atau Afiliasi dari Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham Utama, atau Pengendali, termasuk setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh Perusahaan Terbuka atau Perusahaan Terkendali untuk kepentingan Afiliasi dari Perusahaan Terbuka atau Afiliasi dari anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham Utama, atau Pengendali.

Selama tahun 2023 tidak terdapat transaksi material yang memenuhi kategori transaksi pihak afiliasi.

Transaksi Pihak Berelasi

Dalam menjalankan usahanya, Bank melakukan transaksi dengan pihak - pihak berelasi seperti yang didefinisikan dalam PSAK Nomor 7 tentang "Pengungkapan Pihak - Pihak Berelasi". Suatu pihak dianggap berelasi dengan Bank jika:

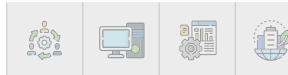
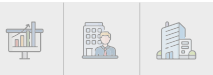
- a. Suatu pihak yang secara langsung, atau tidak langsung yang melalui satu atau lebih perantara, suatu pihak (i) mengendalikan, atau dikendalikan oleh, atau berada di bawah pengendalian bersama, dengan Bank; (ii) memiliki pengaruh signifikan atas Bank; atau (iii) memiliki pengendalian bersama atas Bank;
- b. Suatu pihak yang berada dalam kelompok usaha yang sama dengan Bank;
- c. Suatu pihak yang merupakan ventura bersama di mana Bank sebagai *venturer*;
- d. Suatu pihak adalah anggota dari personil manajemen kunci Bank;
- e. Suatu pihak adalah anggota keluarga dekat dari individu yang diuraikan dalam butir (a) atau (d);
- f. Suatu pihak adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari Bank atau entitas terkait Bank;
- g. Suatu pihak adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama atau dipengaruhi signifikan oleh beberapa entitas, langsung maupun tidak langsung, individu seperti diuraikan dalam butir (d) atau (e).

Nama Pihak yang Bertransaksi dan Sifat Hubungan

Pihak - Pihak berelasi yang melakukan transaksi dengan Perseroan disajikan dalam tabel berikut:

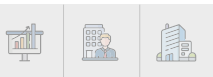
Tabel Pihak Berelasi

Pihak-Pihak Berelasi	Jenis Hubungan	Unsur Transaksi Pihak Berelasi
Pemerintah Republik Indonesia (RI)	Pemegang Saham mayoritas melalui Kementerian Keuangan RI	Obligasi Pemerintah, Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Dalam pengendalian yang sama melalui Pemerintah Pusat RI	Giro pada bank lain, Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain, Efek-efek, Liabilitas Akseptasi, Pinjaman yang diterima dan Surat Berharga yang Diterbitkan
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Dalam pengendalian yang sama melalui Pemerintah Pusat RI	Giro pada bank lain, Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain, Efek-efek, Surat Berharga yang Diterbitkan, Liabilitas Akseptasi
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Dalam pengendalian yang sama melalui Pemerintah Pusat RI	Giro pada bank lain, Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain, Efek-efek, dan Surat Berharga yang Diterbitkan
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	Dalam pengendalian yang sama melalui Pemerintah Pusat RI	Giro pada bank lain, dan Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain
PT Bank Mandiri Taspen	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain, Efek-efek



Pihak-Pihak Berelasi	Jenis Hubungan	Unsur Transaksi Pihak Berelasi
PT Bank Raya Tbk (dahulu PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk)	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain, Simpanan dari Bank Lain, dan Surat Berharga yang Diterbitkan
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	Dalam pengendalian yang sama melalui Pemerintah Pusat RI	Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain, Efek-efek
PT Utama Karya (Persero)	Dalam pengendalian yang sama melalui Pemerintah Pusat RI	Kredit yang diberikan dan Pembiayaan/piutang syariah, Tagihan Akseptasi
Perum Perumnas	Dalam pengendalian yang sama melalui Pemerintah Pusat RI	Efek-efek dan Kredit yang diberikan dan Pembiayaan/piutang syariah
PT PP Properti Tbk	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	Tagihan Akseptasi dan Kredit yang diberikan dan Pembiayaan/ piutang syariah
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	Tagihan Akseptasi dan Garansi yang diterbitkan
PT Wijaya Karya Industri Energi	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	Tagihan Akseptasi
PT Wijaya Karya Industri & Konstruksi	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	Tagihan Akseptasi
Perum Percetakan Negara Republik Indonesia (Perum PNRI)	Dalam pengendalian yang sama melalui Pemerintah Pusat RI	Kredit yang diberikan dan Pembiayaan/piutang syariah
PT Danareksa Investment Management	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	Efek-Efek dan Surat Berharga yang Diterbitkan
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	Dalam pengendalian yang sama melalui Pemerintah Pusat RI	Kredit yang diberikan dan Pembiayaan/piutang syariah
PT Angkasa Pura II (Persero)	Dalam pengendalian yang sama melalui Pemerintah Pusat RI	Kredit yang diberikan dan Pembiayaan/piutang syariah
PT Dok Dan Perkapalan Surabaya (Persero)	Dalam pengendalian yang sama melalui Pemerintah Pusat RI	Kredit yang diberikan dan Pembiayaan/piutang syariah
PT HK Realindo	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	Kredit yang diberikan dan Pembiayaan/piutang syariah
PT Indah Karya (Persero)	Dalam pengendalian yang sama melalui Pemerintah Pusat RI	Kredit yang diberikan dan Pembiayaan/piutang syariah
PT Jasamarga Bali Tol	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah
PT Mandiri Manajemen Investasi	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	Efek-Efek dan Surat Berharga yang Diterbitkan
PT Patra Jasa	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah
PT Permodalan Nasional Madani (Persero)	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	Efek-Efek, Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah
PT Amarta Karya (Persero)	Dalam pengendalian yang sama melalui Pemerintah Pusat RI	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah
PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)	Dalam pengendalian yang sama melalui Pemerintah Pusat RI	Efek-Efek, Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah
PT Taspen (Persero)	Dalam pengendalian yang sama melalui Pemerintah Pusat RI	Surat Berharga yang Diterbitkan
PT Virama Karya (Persero)	Dalam pengendalian yang sama melalui Pemerintah Pusat RI	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah dan Garansi yang diterbitkan
PT Waskita Bumi Wira	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	Kredit yang diberikan dan Pembiayaan/piutang syariah
PT Waskita Karya Realty	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	Kredit yang diberikan dan Pembiayaan/piutang syariah
PT PPA Finance	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah
PT Waskita FIM Perkasa Realty	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah
PT Pertamina (Persero)	Dalam pengendalian yang sama melalui Pemerintah Pusat RI	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah dan efek-efek

Pihak-Pihak Berelasi	Jenis Hubungan	Unsur Transaksi Pihak Berelasi
PT Yodya Karya (Persero)	Dalam pengendalian yang sama melalui Pemerintah Pusat RI	Kredit yang diberikan dan Pembiayaan/piutang syariah dan Garansi yang diterbitkan
PT Adhi Persada Properti	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	Kredit yang diberikan dan Pembiayaan/piutang syariah
PT Perumnas Jakabaring	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	Kredit yang diberikan dan Pembiayaan/piutang syariah
PT Perumnas Sentraland	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	Kredit yang diberikan dan Pembiayaan/piutang syariah
PT Perumnas TOD Tanjung	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	Kredit yang diberikan dan Pembiayaan/piutang syariah
PT Sinergi Investasi Properti	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	Kredit yang diberikan dan Pembiayaan/piutang syariah
PT Perumnas Pondok Cina	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	Kredit yang diberikan dan Pembiayaan/piutang syariah
PT Adhi Commuter Property	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah dan Tagihan Lain-Lain
PT Angkasa Pura I (Persero)	Dalam pengendalian yang sama melalui Pemerintah Pusat RI	Kredit yang diberikan, Pembiayaan/piutang syariah dan Efek-efek
PT Jalin Pembayaran Nusantara	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	Kredit yang diberikan dan Pembiayaan/piutang syariah
PT Reasuransi Nasional Indonesia	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	Surat Berharga yang Diterbitkan
PT Tugu Reasuransi Indonesia	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	Surat Berharga yang Diterbitkan
PT Puspertino	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	Kredit yang diberikan dan Pembiayaan/piutang syariah
PT Asuransi Kredit Indonesia	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	Surat Berharga yang Diterbitkan dan Garansi yang diterbitkan
PT Asuransi Jasa Indonesia	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	Surat Berharga yang Diterbitkan
PT Asuransi Jasa Raharja	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	Surat Berharga yang Diterbitkan
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Dalam pengendalian yang sama melalui Pemerintah Pusat RI	Kredit yang diberikan dan Efek-efek
PT Nindya Karya (Persero)	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	Kredit yang diberikan dan Garansi yang diterbitkan
PT Centurion Perkasa Iman	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	Kredit yang diberikan dan Garansi yang diterbitkan
PT Energi Pelabuhan Indonesia	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	Garansi yang diterbitkan
Perum Jaminan Kredit Indonesia	Dalam pengendalian yang sama melalui Pemerintah Pusat RI	Surat Berharga yang Diterbitkan
PT Daya Mitra Telekomunikasi	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	Efek-efek
PT Industri Kereta Api	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	Kredit yang diberikan dan Pembiayaan/piutang syariah
PT AXA Mandiri Financial Services	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	Surat Berharga yang Diterbitkan
PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)	Dalam pengendalian yang sama melalui Pemerintah Pusat RI	Surat Berharga yang Diterbitkan
PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)	Dalam pengendalian yang sama melalui Pemerintah Pusat RI	Surat Berharga yang Diterbitkan
PT Tugu Pratama Indonesia	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	Surat Berharga yang Diterbitkan
PT Sarana Multigriya Finance (Persero)	Dalam pengendalian yang sama melalui Pemerintah Pusat RI	Efek - Efek, Pinjaman yang diterima dan Pinjaman Subordinasi dan efek-efek subordinasi
PT Sinergi Colomadu	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	Kredit yang diberikan dan Pembiayaan/piutang syariah



Pihak-Pihak Berelasi	Jenis Hubungan	Unsur Transaksi Pihak Berelasi
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	Dalam pengendalian yang sama melalui Pemerintah Pusat RI	Efek-efek
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	Dalam pengendalian yang sama melalui Pemerintah Pusat RI	Efek-efek
PT PP Properti Jababeka Residence	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	Kredit yang diberikan dan Pembiayaan/piutang syariah
PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)	Dalam pengendalian yang sama melalui Pemerintah Pusat RI	Efek-efek
PT Pegadaian	Dalam pengendalian yang sama melalui Pemerintah Pusat RI	Efek-efek
PT BNI Asset Management	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	Surat Berharga yang Diterbitkan dan efek-efek
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	Dalam pengendalian yang sama melalui Pemerintah Pusat RI	Efek-efek
PT Peruri Properti	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	Kredit yang diberikan dan Pembiayaan/piutang syariah dan Garansi yang diterbitkan
PT Waskita Beton Precast Tbk	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	Efek-efek
PT BRI Manajemen Investasi	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	Efek-efek
PT Pos Indonesia (Persero)	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	Garansi yang diterbitkan
PT Telkom Satelit Indonesia	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	Garansi yang diterbitkan
PT Inhutani V	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	Kredit yang diberikan dan Pembiayaan/piutang syariah
Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat	Dalam pengendalian yang sama melalui Pemerintah Pusat RI	Pinjaman dan Efek-Efek Subordinasi
PT PP Urban	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	Garansi yang diterbitkan, Tagihan lain-lain, Kredit yang diberikan dan Pembiayaan/piutang syariah
PT Aviata Pariwisata Indonesia (Persero)	Dalam pengendalian yang sama melalui Pemerintah Pusat RI	Kredit yang diberikan dan Pembiayaan/piutang syariah
PT Bio Farma (Persero)	Dalam pengendalian yang sama melalui Pemerintah Pusat RI	Kredit yang diberikan dan Pembiayaan/piutang syariah
PT Inka Multi Solusi Service	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang Syariah dan Tagihan lain-lain
PT PAL Indonesia (Persero)	Dalam pengendalian yang sama melalui Pemerintah Pusat RI	Kredit yang diberikan dan Pembiayaan/piutang syariah dan Garansi yang diterbitkan
PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero)	Dalam pengendalian yang sama melalui Pemerintah Pusat RI	Kredit yang diberikan dan Pembiayaan/piutang syariah
PT Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta	Dalam pengendalian yang sama melalui Pemerintah Pusat RI	Kredit yang diberikan dan Pembiayaan/piutang syariah
PT Wika Realty	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	Kredit yang diberikan dan Pembiayaan/piutang syariah
PT Wika Gedung	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	Tagihan lain-lain
PT Bahana TCW Investment Management	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	Efek-efek
Manajemen Kunci termasuk Direksi, Komisaris, Komite Audit, Kepala Divisi dan Kepala Cabang	Hubungan pengendalian kegiatan perusahaan	Kredit yang Diberikan dan Pembiayaan/piutang Syariah, Simpanan dari Nasabah, dan Dana Syirkah Temporer

Kewajaran Transaksi dan Alasan Dilakukannya Transaksi

Transaksi pihak berelasi terjadi karena adanya kebutuhan usaha Perseroan. Seluruh transaksi dilakukan secara normal dan wajar (*arm's length transaction*) sebagaimana transaksi dengan pihak lain. Perseroan menjamin bahwa seluruh transaksi bebas dari konflik kepentingan dan telah memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

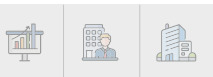
Realisasi Transaksi Pihak Berelasi

Berikut rincian realisasi transaksi pihak berelasi karena hubungan kepemilikan dengan Pemerintah Republik Indonesia dan transaksi pihak berelasi dengan Manajemen Kunci.

Tabel Transaksi Pihak Berelasi Karena Hubungan Kepemilikan Dengan Pemerintah Republik Indonesia

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2023	2022
Aset		
Giro pada bank lain	1.049.449	508.322
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	61	61
Efek - efek	3.851.105	850.059
Obligasi Pemerintah	35.893.929	51.964.973
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah	27.678.581	19.594.018
Tagihan akseptasi	68.746	131.356
Tagihan lain - lain	106.385	61.169
Total aset untuk pihak - pihak berelasi	68.648.256	73.109.958
Cadangan kerugian penurunan nilai dari pihak - pihak berelasi	(1.227.528)	(900.235)
Total aset untuk pihak - pihak berelasi - neto	67.420.728	72.209.723
Persentase total aset pihak berelasi terhadap total aset	15,37%	17,96%
Liabilitas		
Simpanan dari nasabah	196.674.002	173.906.896
Liabilitas akseptasi	224.045	118.525
Surat - surat berharga yang diterbitkan	5.868.525	4.355.008
Pinjaman yang diterima	22.453.290	17.455.685
Pinjaman subordinasi dan efek - efek subordinasi	4.499.997	4.499.977
Total liabilitas untuk pihak - pihak berelasi	229.719.859	200.336.091
Persentase total liabilitas pihak berelasi terhadap total liabilitas	60,27%	57,01%
Dana Syirkah Temporer		
Giro Mudharabah	11.271	11.897
Tabungan Mudharabah	133.630	83.465
Deposito Mudharabah	8.899.072	7.631.970
Total dana syirkah temporer untuk pihak-pihak berelasi	9.043.973	7.727.332
Persentase total dana syirkah temporer berelasi terhadap dana syirkah temporer	33,37%	31,08%
Pendapatan Bunga dan Bagi Hasil		
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	490.484	282.311
Efek - efek	299.741	216.020
Obligasi Pemerintah	1.220.648	1.518.936
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah	1.195.910	1.081.237
Total pendapatan bunga dan bagi hasil dari pihak-pihak berelasi	3.206.783	3.098.504
Persentase terhadap total pendapatan bunga dan bagi hasil	11,34%	11,96%
Beban bunga, bagi hasil dan bonus		
Simpanan dari nasabah	3.137.470	2.642.731
Simpanan dari Bank Lain	2.647	781



Uraian	2023	2022
Surat - surat berharga yang diterbitkan	433.269	455.401
Pinjaman yang diterima	965.111	843.147
Efek - efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	34.593	4.894
Pinjaman subordinasi dan efek - efek subordinasi	381.770	381.760
Giro Mudharabah	18	181
Tabungan Mudharabah	1.896	6.521
Deposito Mudharabah	149.498	80.613
Total beban bunga dan bonus dari pihak berelasi	5.106.272	4.416.029
Persentase terhadap total beban bunga, bagi hasil dan bonus	34,38%	40,48%
Komitmen dan kontinjensi pada rekening administratif		
Garansi yang diberikan	1.116.581	426.438
Irrevocable L/C yang masih berjalan	8.840	115.445
Total komitmen dan kontinjensi pada rekening administratif dari pihak berelasi	1.125.421	541.883
Persentase terhadap total komitmen dan kontinjensi pada rekening administratif	41,28%	43,35%

Tabel Transaksi Pihak Berelasi Dengan Manajemen Kunci

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2023	2022
Aset		
Kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah	94.105	102.781
Cadangan kerugian penurunan nilai dari pihak - pihak berelasi	(288)	(374)
Total aset untuk pihak-pihak berelasi-neto	93.817	102.407
Persentase terhadap total aset	0,02%	0,03%
Liabilitas		
Simpanan dari nasabah	186.924	115.340
Liabilitas imbalan kerja	288.487	268.476
Total liabilitas dari manajemen kunci	475.411	383.816
Persentase terhadap total liabilitas	0,12%	0,11%
Dana Syirkah Temporer		
Giro Mudharabah	2.203	-
Tabungan Mudharabah	8.363	4.962
Deposito Mudharabah	9.297	5.221
Total dana syirkah temporer untuk pihak-pihak berelasi	19.863	10.183
Persentase total dana syirkah temporer berelasi terhadap dana syirkah temporer	0,07%	0,04%
Pendapatan bunga dan bagi hasil		
Kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah	6.821	6.929
Persentase terhadap total pendapatan bunga dan bagi hasil	0,02%	0,03%
Beban Bunga, bagi hasil dan bonus		
Simpanan dari nasabah	1.446	1.564
Dana Syirkah	402	168
Total beban bunga, bagi hasil dan bonus	1.848	1.732
Persentase terhadap total beban bunga, bagi hasil dan bonus	0,01%	0,03%
Imbalan Jangka Pendek:		
Direksi	161.529	131.671
Dewan Komisaris	64.480	51.960

Uraian	2023	2022
Imbalan Pasca Kerja:		
Karyawan Kunci Lain	200.829	182.874
Imbalan Jangka Panjang Lainnya:		
Karyawan Kunci Lain	87.658	85.602
Total	730.749	673.932
Persentase terhadap total beban gaji dan tunjangan karyawan	18,35%	16,08%

Rincian nama pihak terkait realisasi (nilai) transaksi pihak berelasi disajikan pada catatan atas Laporan Keuangan Nomor 43 yang terlampir pada Laporan Tahunan ini. Transaksi berelasi tersebut merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan.

Kebijakan Mekanisme Review atas Transaksi

Seluruh transaksi telah melalui mekanisme review sesuai dengan jenis transaksi. Setiap transaksi dilakukan analisis kelayakan transaksi antara lain analisis kredit untuk transaksi kredit kepada pihak berelasi. Demikian pula untuk transaksi investasi telah dilakukan analisis kelayakan investasi. Begitu pula dengan transaksi pihak berelasi lainnya seperti garansi yang diterbitkan dan penempatan pada Bank lain.

Direksi menyatakan bahwa transaksi telah melalui prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (*arm's length principle*). Direksi diwajibkan untuk melaporkan hasil Keputusan Rapat Komite Kredit untuk nilai *threshold* debitur tertentu kepada Dewan Komisaris secara bulanan. Ketentuan nilai *threshold* debitur yaitu sebagai berikut:

- *Single debtor* ≥ Rp350 miliar
- *Group debtor* ≥ Rp500 miliar

Debitur tertentu sebagaimana dimaksud di atas juga termasuk debitur yang dikategorikan pihak berelasi.

Pada tahun 2023 tidak terdapat transaksi pihak berelasi yang membutuhkan persetujuan RUPS.

Pemenuhan Peraturan dan Ketentuan Terkait

Perseroan senantiasa berkomitmen untuk menjalankan bisnis yang *prudent*. Seluruh transaksi telah memenuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Perubahan Peraturan Perundang - Undangan dan Dampaknya Terhadap Perseroan

Uraian perubahan peraturan perundang - undangan tahun 2023 dan dampaknya terhadap Perseroan dijelaskan sebagai berikut:

Tabel Perubahan Peraturan Perundang - Undangan

No	Peraturan Perundang - Undangan	Pokok Pengaturan	Informasi Penyesuaian Yang Dilakukan	Dampak Terhadap Laporan Keuangan
1.	Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.	Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan	Adanya perubahan dan/atau penyesuaian pada internal Bank yang secara umum mengenai: 1. Pihak Terafiliasi dari Bank. 2. Rahasia Bank. 3. Perluasan Kriteria Orang/Pihak Yang Dikenakan Ketentuan Larangan Transaksi Orang Dalam. 4. Pelindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. 5. Ketentuan Sanksi Dalam Tindak Pidana Perbankan.	Penerbitan peraturan tidak memiliki dampak kuantitatif terhadap Laporan Keuangan.
2.	Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER - 1/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.	Pokok pengaturan antara lain mengenai: - Penugasan Khusus. - Komite Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). - Program TJSL Pembiayaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil. - Program TJSL dan Bantuan. - Pengawasan dan Pelaporan Keuangan dan Pelaksanaan TJSL.	Adanya perubahan dan/atau penyesuaian pada internal Bank kaitannya dengan pengelolaan tanggung jawab sosial dan lingkungan.	Penerbitan peraturan tidak memiliki dampak kuantitatif terhadap Laporan Keuangan, hanya memuat mengenai kewajiban penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Pelaksanaan program TJSL BUMN kepada menteri dalam Laporan Triwulanan dan Tahunan.



No	Peraturan Perundang - Undangan	Pokok Pengaturan	Informasi Penyesuaian Yang Dilakukan	Dampak Terhadap Laporan Keuangan
3.	Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER - 2/ MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.	Pokok pengaturan antara lain mengenai: - Prinsip tata kelola perusahaan yang baik, hak dan tanggung jawab Pemegang Saham/Pemilik Modal, RUPS, tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas. - Penetapan sistem pengendalian intern dan penyelenggaraan pengawasan intern. - Penyelenggaraan fungsi sekretaris perusahaan. - Penerapan tata kelola Teknologi Informasi (TI). - Etika berusaha dan anti korupsi. - Penyelenggaraan sistem. - Penanganan pengaduan. - Kebijakan manajemen risiko. - Penilaian tingkat kesehatan BUMN. - Perencanaan strategis BUMN. - Penetapan, evaluasi dan isi RSTI. - Tambahan penyertaan modal, restrukturisasi, privatisasi, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pembubaran dan likuidasi. - Prinsip, jenis, SOP dan perjanjian kerjasama BUMN. - Pemindahtanganan, penjualan, tukar menukar, ganti rugi dan aktiva tetap dijadikan penyertaan modal. - Pedoman pengadaan barang dan jasa BUMN, penghapusbukuan terhadap aktiva tetap. - Pengendalian risiko pasar dilakukan melalui transaksi lindung nilai. - Arsitektur teknologi informasi, pengembangan layanan Teknologi Informasi (TI), keberlangsungan layanan Teknologi Informasi (TI), ketahanan dan keamanan siber, pengelolaan data dan pelaporan penyelenggaraan Teknologi Informasi (TI). - Laporan triwulanan dan laporan tahunan, laporan tertentu dan penyampaian laporan.	Adanya perubahan dan/atau penyesuaian pada internal Bank kaitannya dengan tata kelola dan kegiatan korporasi. - Direksi wajib menetapkan tata tertib rapat Direksi. - Direksi wajib menetapkan suatu Sistem Pengendalian Intern yang efektif untuk mengamankan investasi dan aset perusahaan. - Dalam rangka menyelenggarakan pengawasan intern, Direksi wajib membentuk SPI (Satuan Pengawasan internal) dan membuat piagam pengawasan intern. - Dalam penerapan Tata Kelola Teknologi Informasi (TI), Direksi menyusun dan menetapkan pedoman Tata Kelola Teknologi Informasi (TI). - BUMN wajib membuat suatu pedoman tentang perilaku dan etika (<i>code of conduct</i>), yang pada dasarnya memuat nilai etika berusaha dan perilaku. - BUMN wajib memiliki Taksonomi Risiko BUMN dan Anak Perusahaan BUMN yang terintegrasi sesuai dengan kebutuhan pengawasan target kinerja BUMN dan Anak Perusahaan BUMN. - Untuk melaksanakan Peraturan Menteri BUMN ini, Direksi dan/atau Dewan Komisaris BUMN wajib menyusun dan/atau menyesuaikan pedoman internal, struktur organisasi, dan fungsi serta organ pengelola Risiko sesuai dengan karakteristik perusahaan dan batas kewenangannya. - SOP Kerja Sama dengan Mitra disusun dan ditetapkan oleh Direksi, dalam waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal Permen BUMN diundangkan. - Penetapan dan/atau Penyesuaian SOP Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa oleh Direksi, dalam waktu 6 (enam) bulan sejak diundangkan. - Direksi BUMN membuat daftar hitam (<i>black list</i>) Penyedia dengan disertai alasan yang cukup, dituangkan dalam SOP BUMN. - Direksi harus menyusun dan/atau menyesuaikan Kebijakan Lindung Nilai dan SOP Pelaksanaan Transaksi Lindung Nilai. - Dalam rangka menyelenggarakan Teknologi Informasi (TI), Direksi menetapkan arsitektur Teknologi Informasi (TI). Arsitektur Teknologi Informasi (TI) dapat menjadi bagian atau dokumen yang terpisahkan dari Rencana Strategis Teknologi Informasi (TI). - BUMN wajib memiliki rencana keberlangsungan layanan Teknologi Informasi (TI).	Penerbitan peraturan tidak memiliki dampak kuantitatif terhadap Laporan Keuangan, hanya memuat ketentuan mengenai komponen yang terdapat pada Laporan Keuangan dan periode penyampaian Laporan Keuangan kepada Menteri.

No	Peraturan Perundang - Undangan	Pokok Pengaturan	Informasi Penyesuaian Yang Dilakukan	Dampak Terhadap Laporan Keuangan
4.	Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER - 3/MBU/03/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.	Pokok pengaturan antara lain mengenai: - Syarat menjadi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris (Anggaran Dasar). - Manajemen Talenta Direksi BUMN. - Tata cara pengangkatan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN (Anggaran Dasar). - Tata cara pengangkatan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Anak Perusahaan. - Tata cara pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN (Anggaran Dasar). - Penghasilan anggota Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN - Organ Pendukung Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas BUMN.	Adanya perubahan dan/atau penyesuaian pada internal Bank kaitannya dengan organ dan sumber daya manusia.	Penerbitan peraturan tidak memiliki dampak kuantitatif terhadap Laporan Keuangan.
5.	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 tentang Penerapan Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan.	Pokok pengaturan antara lain mengenai: - Pengaturan Pelaksanaan Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR). - Pengaturan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh lembaga penyalur. - Pengaturan Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR). - Penghitungan agunan Kredit Usaha Rakyat (KUR). - Proses penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) berdasarkan jenisnya. - Pelaporan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). - Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR). - Kewajiban Penyedia Jasa Keuangan (PJK) dalam Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal. - Pengaturan pengenaan sanksi yang efektif, proporsional dan disuasif. - Kewajiban PJK dalam menyampaikan Individual Risk Assessment secara periodik kepada OJK. - Persyaratan dan tata cara kerja sama PJK dengan pihak ketiga dalam rangka verifikasi secara tatap muka (<i>face to face</i>) dan tidak tatap muka (<i>non - face to face</i>) melalui sarana elektronik. - Penyempurnaan ketentuan fungsi manajemen kepatuhan dan pelaksanaan audit internal secara independen. - Prosedur pre - <i>employee screening</i>. - Kewajiban PJK menyampaikan data untuk kebutuhan pengawasan - Customer Due Diligence (CDD) sederhana, CDD terhadap pemilik manfaat (<i>beneficial owner</i>) terhadap seluruh jenis nasabah termasuk perusahaan publik/emiten dan lembaga negara. - Larangan outsourcing atau hubungan keagenan dalam CDD pihak ketiga. - Penambahan cakupan pihak pelapor yang diawasi OJK yaitu wali amanat, penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI), penyelenggara <i>Supply Chain Financing</i> (SCF), dan penyelenggara Identitas Kependudukan Digital (IKD). - Menambahkan Perseroan Perorangan sebagai entitas baru dalam Korporasi.	Adanya perubahan dan/atau penyesuaian pada internal Bank kaitannya penerapan program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT), dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan (PPSPM). dalam pemberian layanan kepada nasabah sebagai konsumen serta dengan <i>counterparty</i> Bank.	Penerbitan peraturan tidak memiliki dampak kuantitatif terhadap Laporan Keuangan.



No	Peraturan Perundang - Undangan	Pokok Pengaturan	Informasi Penyesuaian Yang Dilakukan	Dampak Terhadap Laporan Keuangan
6.	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum (POJK Tata Kelola)	Pokok pengaturan antara lain mengenai: - Kewajiban bank menerapkan prinsip tata kelola yang baik pada Bank dalam penyelenggaraan kegiatan usaha. - Penerapan prinsip tata kelola yang baik pada bank, yang paling sedikit mencakup keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi dan kewajaran. - POJK ini juga mengatur mengenai laporan pelaksanaan tata kelola dan penilaian penerapan tata kelola	Adanya perubahan dan/atau penyesuaian pada internal Bank kaitannya dengan tata kelola Bank BTN sebagai Bank Umum. - Kepengurusan Dewan Komisaris dan Direksi (Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang, Jumlah, Komposisi, Kriteria, Tata Tertib Kerja, dan Pengaturan Rapat, Penggantian, Pemberhentian, dan/atau Pengangkatan, Pengaturan Rangkap Jabatan) - Komite dibawah Dewan Komisaris diangkat dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris dan dilakukan evaluasi setiap akhir tahun buku. - kewajiban penerapan manajemen risiko dalam mencakup pencegahan dan penanganan agar Bank tidak dimanfaatkan dalam aktivitas terkait tindak pidana dan melaksanakan prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, dan pengelolaan perbankan yang sehat, dalam hal Bank melakukan kemitraan dalam kegiatan usahanya. - Dalam pelaporan dan sistem teknologi informasi Bank wajib memastikan keandalan penyusunan laporan keuangan dan informasi kinerja keuangan yang di audit oleh auditor eksternal, wajib memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung sistem informasi manajemen yang memadai untuk pengambilan keputusan Direksi dan pengawasan Dewan Komisaris, dan dilarang memanfaatkan dan/atau menyalahgunakan rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum untuk kepentingan Bank dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal Bank yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan Bank yang sehat. - Penyesuaian kegiatan rencana strategis Bank wajib melaksanakan rencana penanganan permasalahan keuangan dan/atau penguatan modal Bank yang dicantumkan dalam RBB, menginformasikan rencana penanganan permasalahan keuangan dan/atau penguatan modal Bank kepada PSP. - pengaturan terkait dengan Aspek Pemegang Saham penerapan strategi anti <i>fraud</i> dan penerapan keuangan berkelanjutan. - Adanya penambahan ketentuan denda dari regulator.	Penerbitan peraturan tidak memiliki dampak kuantitatif terhadap Laporan Keuangan.

No	Peraturan Perundang - Undangan	Pokok Pengaturan	Informasi Penyesuaian Yang Dilakukan	Dampak Terhadap Laporan Keuangan
7.	Peraturan Bank Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen Bank Indonesia	Pokok pengaturan antara lain mengenai: - Ruang lingkup pelindungan konsumen. - Prinsip pelindungan konsumen. - Penanganan pengaduan konsumen oleh Bank Indonesia. - Pengenaan sanksi. - Kegiatan pengawasan. - Mekanisme koordinasi.	- Dilakukannya redefinisi konsumen dan penyelenggara. - Penyesuaian ruang lingkup pelindungan konsumen dan penegakan bahwa penyelenggara tersebut adalah yang berhubungan langsung dengan konsumen. - Pengaturan prinsip perlindungan konsumen disempurnakan selaras dengan UUP2SK dan <i>international best practices</i>, serta memperhatikan perkembangan inovasi keuangan <i>digital</i>. - Penambahan pengaturan terkait tujuan dari pelindungan konsumen. - Penambahan pengaturan terkait hak dan kewajiban konsumen dan penyelenggara. - Penguatan penanganan pengaduan konsumen melalui penyelesaian sengketa. - Penyesuaian sanksi administratif bagi penyelenggara yang tidak memenuhi kewajiban dalam rangka pelindungan konsumen.	Perubahan peraturan tidak memiliki dampak kuantitatif terhadap laporan keuangan
8.	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21 Tahun 2023 tentang Layanan Digital Bank Umum	Pokok pengaturan antara lain mengenai: - Ruang lingkup layanan <i>digital</i>. - persyaratan dan unit/fungsi layanan <i>digital</i>. - identifikasi dan verifikasi. - Perizinan dan pelaporan. - Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI). - Pelindungan nasabah dan pelindungan data pribadi.	- Dilakukannya redefinisi layanan perbankan <i>digital</i> dan layanan perbankan elektronik menjadi layanan <i>digital</i>; - Re kategorisasi layanan <i>digital</i> yang dibagi menjadi layanan <i>digital</i> yang diselenggarakan oleh Bank dan diselenggarakan oleh Bank dengan mitra; - Penyesuaian persyaratan penyelenggaraan layanan <i>digital</i> yang berfokus pada kesiapan infrastruktur Teknologi Informasi (TI) Bank yang mengacu pada <i>Self Assesment</i> DMAB; - Harmonisasi pengaturan mengenai identifikasi dan verifikasi dengan POJK APU PPT PPSPM; - Perubahan mekanisme perizinan dimana untuk layanan <i>digital</i> yang termasuk sistem pembayaran dan diatur secara khusus oleh BI maka dikategorikan sebagai produk bank dasar; - Penerapan prinsip adopsi Teknologi Informasi (TI) dan tanda tangan elektronik dalam penyelenggaraan layanan <i>digital</i>; - Penerapan prinsip pelindungan konsumen dan pelindungan data pribadi dalam penyelenggaraan layanan <i>digital</i>.	Perubahan peraturan tidak memiliki dampak kuantitatif terhadap laporan keuangan.



Perubahan Kebijakan Akuntansi

Alasan Perubahan Kebijakan Akuntansi

Pada tanggal 1 Januari 2023 terdapat standar baru dan penyesuaian atau amendemen terhadap beberapa standar yang masih berlaku dan berlaku efektif sejak tanggal tersebut. Perubahan kebijakan akuntansi dilakukan untuk mematuhi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku dalam tahun berjalan.

Informasi Perubahan Kebijakan Akuntansi

Uraian informasi perubahan kebijakan akuntansi tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel Perubahan Kebijakan Akuntansi Tahun 2023

No	Perubahan Kebijakan Akuntansi	Dampak Secara Kuantitatif Perubahan Kebijakan Akuntansi Terhadap Laporan Keuangan
1	Amendemen PSAK 1 – “penyajian laporan keuangan terkait pengungkapan kebijakan akuntansi” - Amendemen ini bertujuan untuk entitas menggunakan istilah pengungkapan “informasi kebijakan akuntansi material” dibandingkan dengan “kebijakan akuntansi signifikan”. - Mengklarifikasikan bahwa tidak semua kebijakan akuntansi terkait dengan transaksi, kejadian, atau kondisi material lainnya adalah material dalam laporan keuangan.	- Merubah istilah pengungkapan “kebijakan akuntansi signifikan” menjadi “informasi kebijakan akuntansi material” - Dampak atas penerapan standar baru dan penyesuaian amendemen tersebut tidak material terhadap laporan keuangan.
2	Amendemen PSAK 1 – “penyajian laporan keuangan tentang klasifikasi liabilitas sebagai jangka pendek atau jangka panjang” - Amendemen ini bertujuan untuk mengklarifikasi salah satu kriteria dalam mengklasifikasikan liabilitas sebagai jangka panjang yaitu mensyaratkan entitas memiliki hak untuk menangguhkan penyelesaian liabilitas setidaknya selama 12 bulan setelah periode pelaporan. - Menerapkan bahwa hak entitas untuk menangguhkan penyelesaian liabilitas harus ada pada akhir periode pelaporan. - Mengklarifikasi bahwa klasifikasi tidak berpengaruh oleh niat atau harapan manajemen tentang apakah entitas akan menggunakan akan menggunakan haknya untuk menangguhkan penyelesaian liabilitas. - Mengklarifikasi bagaimana kondisi pinjaman mempengaruhi klasifikasi - Memperjelas persyaratan entitas mengklasifikasikan liabilitas berdasarkan pada kemampuan untuk menyelesaikan liabilitas dengan menerbitkan <i>instrument</i> ekuitas sendiri.	- Menambahkan deskripsi dan menyesuaikan klasifikasi liabilitas. - Dampak atas penerapan standar baru dan penyesuaian amendemen tersebut tidak material terhadap laporan keuangan.
3	Amendemen PSAK 25 – “kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan terkait definisi estimasi akuntansi” - Amendemen ini bertujuan untuk memperkenalkan definisi “estimasi akuntansi” yaitu jumlah moneter dalam laporan keuangan yang dipengaruhi oleh ketidakpastian pengukuran. - Mengklarifikasi bahwa teknik estimasi dan penilaian merupakan contoh teknik pengukuran yang digunakan dalam mengembangkan estimasi akuntansi. - Mengklarifikasi bahwa perubahan dalam estimasi akuntansi sebagai hasil informasi baru atau perkembangan baru yang bukan merupakan korelasi kesalahan.	- Penyesuaian definisi “estimasi akuntansi” untuk jumlah moneter yang dipengaruhi oleh ketidakpastian pengukuran. - Dampak atas penerapan standar baru dan penyesuaian amendemen tersebut tidak material terhadap laporan keuangan.
4	Amendemen PSAK 16 – “aset tetap hasil sebelum penggunaan yang diintensikan” - Paragraf 17(e): melarang pengurangan hasil neto penjualan setiap item yang dihasilkan, saat membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diperlukan supaya aset siap digunakan sesuai dengan intensi manajemen, dari biaya pengujian (seperti sampel yang dihasilkan ketika menguji apakah aset tersebut berfungsi dengan baik). - Menambahkan <i>Paragraph</i> 20A: entitas mengakui hasil penjualan dan biaya perolehan atas item yang dihasilkan saat membawa aset tetap ke lokasi dan kondisi yang diperlukan supaya aset siap digunakan sesuai dengan intensi manajemen dalam Laba Rugi. Selanjutnya entitas mengukur biaya perolehan atas item tersebut dengan menerapkan persyaratan pengukuran dalam PSAK 14: persediaan - Menambahkan Paragraf 74A – yang mengatur jika tidak disajikan secara terpisah dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.	- Mengklarifikasikan biaya pengujian dilarang untuk pengurang hasil neto penjualan setiap produk. - Mendeskripsikan arti pengujian yaitu menguji aset berfungsi dengan baik, menilai kinerja teknis dan kinerja fisik aset tersebut. - Dampak atas penerapan standar baru dan penyesuaian amendemen tersebut tidak material terhadap laporan keuangan.
5	Amendemen PSAK 46 – “pajak penghasilan tentang pajak tangguhan terkait aset dan liabilitas yang timbul dari transaksi tunggal” Amendemen ini mengatur entitas mengakui aset maupun liabilitas pajak tangguhan pada saat pengakuan awalnya misalnya dari transaksi sewa, untuk menghilangkan perbedaan praktik di lapangan atas transaksi tersebut dan transaksi serupa yang diadopsi dari <i>Amendemen IAS 12 Income Taxes tentang Deferred Tax related to Assets and Liabilities arising from a Single Transaction</i>.	- Menambahkan pengecualian pengakuan awal untuk liabilitas pajak tangguhan. - Menambahkan deskripsi terkait pengakuan awal untuk aset atau liabilitas. - Dampak atas penerapan standar baru dan penyesuaian amendemen tersebut tidak material terhadap laporan keuangan.

No	Perubahan Kebijakan Akuntansi	Dampak Secara Kuantitatif Perubahan Kebijakan Akuntansi Terhadap Laporan Keuangan
6	Amendemen PSAK 107 – “akuntansi ljarah”	Dampak atas penerapan standar baru dan penyesuaian amendemen tersebut tidak material terhadap laporan keuangan.
7	Amendemen PSAK 73 – “Sewa” • Liabilitas sewa pada transaksi jual dan sewa balik	Dampak atas penerapan standar baru dan penyesuaian amendemen tersebut tidak material terhadap laporan keuangan.

Tingkat Kesehatan Bank

Tingkat kesehatan bank mencerminkan hasil penilaian kondisi perseroan yang dilakukan terhadap risiko dan kinerja bank yang dapat dilihat dari peringkat akhir hasil penilaian berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 04/POJK.03/2016 Tanggal 26 Januari 2017 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan

Bank Umum dan Surat Edaran OJK Nomor 14/SEOJK.03/2017 Tanggal 17 Maret 2017 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Dengan Menggunakan Pendekatan Risiko (*Risk - Based Bank Rating*) yang mencakup 4 (empat) faktor yaitu Profil Risiko, Tata Kelola, Rentabilitas (*Earnings*) dan Permodalan (*Capital*).

Tabel Tingkat Kesehatan Perseroan Posisi 31 Desember 2023 - 2022 Secara Individu (*Self Assessment*)

Faktor Penilaian	Penilaian Per 31 Desember 2023	Penilaian Per 31 Desember 2022
	Peringkat	Peringkat
Profil Risiko	2	2
Tata Kelola	2	2
Rentabilitas (<i>Earnings</i>)	2	2
Permodalan (<i>Capital</i>)	2	1
Peringkat Tingkat Kesehatan Bank Berdasarkan Risiko	2	2

Peringkat kesehatan bank posisi Desember 2023 (*Self Assessment*) berada pada peringkat komposit 2 (PK2) yang mencerminkan kondisi bank yang secara umum sehat sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.

Selain itu, penilaian tingkat kesehatan menggunakan pemeringkatan juga diatur dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-2/MBU/03/2023 Tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara. Peringkat (*rating*) tingkat kesehatan Badan Usaha Milik Negara yang dinilai oleh Lembaga Pemeringkat Nasional untuk posisi 31 Desember 2023 adalah AAA sehingga termasuk dalam klasifikasi “**Sangat Sehat**”. Laporan Pemeringkatan Tingkat Kesehatan sebagaimana dimaksud lebih rinci tercantum dalam Lampiran Laporan Tahunan ini.

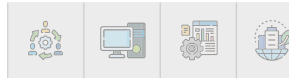
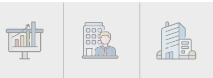
Informasi Kelangsungan Usaha

Hal - Hal yang Berpotensi Berpengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha

Momentum perbaikan ekonomi nasional terus berjalan di tengah risiko ketegangan geopolitik global. Pertumbuhan ekonomi Triwulan I - 2023 tetap kuat dengan pertumbuhan 5,03% (yoy). Kondisi ini berkontribusi positif terhadap peningkatan konsumsi rumah

tangga, usaha UMKM dan manufaktur. Hal ini tercermin dari perkembangan dari Indeks Kepercayaan Konsumen (IKK) pada Triwulan III - 2023 yang tetap kuat, sebesar 121,7 dan *Purchasing Manager Index* (PMI) yang sebesar 51,7 poin pada tahun 2023 yang menunjukkan level ekspansi. Sejalan dengan momentum pertumbuhan yang berjalan, intermediasi perbankan terus membaik dengan ketahanan yang kuat untuk mendukung pertumbuhan. Pada Triwulan III - 2023, kredit nasional tumbuh 8,96% (yoy), Kredit KPR menunjukkan tren peningkatan pertumbuhan hingga lebih dari 10% (yoy) pada Agustus 2023, naik dibandingkan dengan akhir 2022 (8,17% yoy). Kenaikan KPR tersebut didorong oleh stimulus Pemerintah untuk meningkatkan kontribusi sektor perumahan pada proses pemulihan ekonomi nasional melalui keberlanjutan program hunian bersubsidi. Sektor tersebut juga menjadi salah satu sektor yang didorong oleh pemerintah dalam implementasi Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM). Rasio kecukupan modal atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR) Perseroan per Desember 2023 yang tetap tinggi, yaitu sebesar 20,14% serta rasio NPL Gross yang tetap terjaga sebesar 3,01% menunjukkan bahwa tingkat kesehatan dan manajemen resiko bank telah berjalan dengan cukup baik untuk dapat menopang keberlangsungan usaha.

Pemerintah terus mendukung proses pemulihan yang berlangsung, untuk mengantisipasi dampak risiko geopolitik global terhadap ekonomi melalui bauran kebijakan fiskal dan moneter. Hal ini tercermin dari upaya Pemerintah untuk menjaga ketahanan energi dan pangan nasional di tengah lonjakan kenaikan harga energi

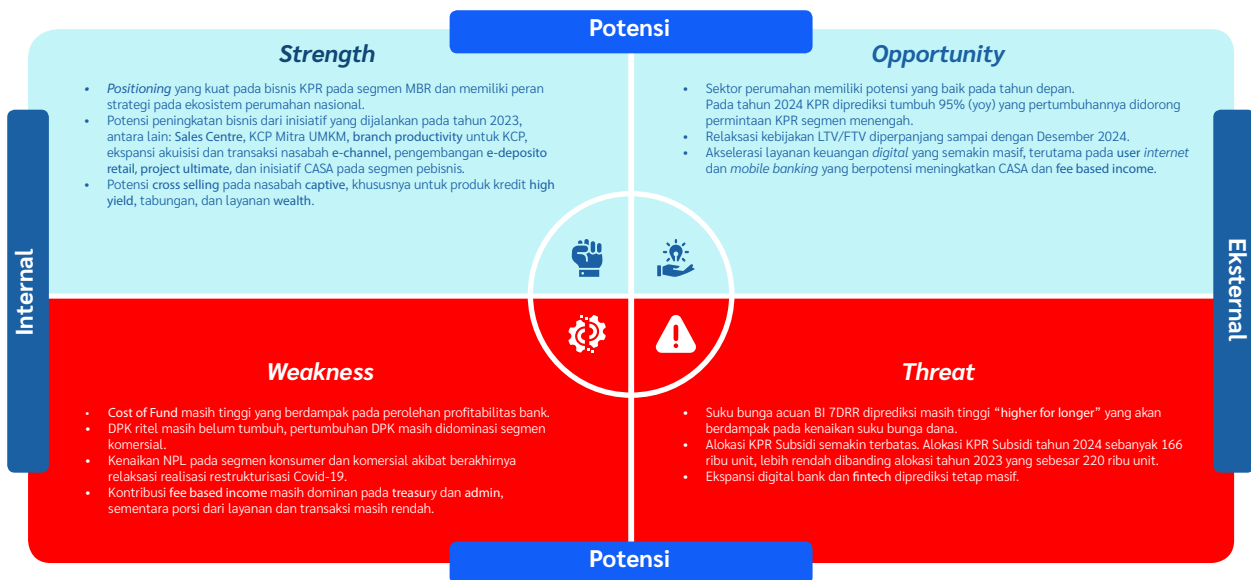


dan komoditas global akibat terganggunya rantai pasok global dengan meningkatkan belanja Pemerintah untuk subsidi energi dan anggaran untuk program Bantuan Sosial (Bansos). Selain itu, untuk melanjutkan proses pemulihan pada sektor keuangan, Bank Indonesia juga menunda kenaikan suku bunga acuan BI 7 days *repo* hingga pada tanggal 22 - 23 November 2023 pada angka 6,00%. Langkah ini diambil dalam rangka stabilisasi nilai rupiah di tengah efek dari ketidakpastian ekonomi global dan sebagai langkah preventif terhadap prediksi peningkatan inflasi. Bank Indonesia menargetkan bahwa pertumbuhan inflasi pada tahun 2024 masih dapat dikontrol di angka 2,5% - 3,5% di 2024.

Berdasarkan hal-hal yang telah dijabarkan di atas, Perseroan memiliki kekuatan dan keunggulan kompetitif serta inovasi yang berkesinambungan dalam menghadapi ketidakpastian kondisi tersebut yang dapat diakomodir dengan baik oleh Perseroan. Selain itu, dengan penerapan berbagai inisiatif strategi yang tepat, kelangsungan usaha Perseroan dapat terjaga dengan baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Perseroan tidak memiliki hal - hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha.

Assessment Manajemen Atas Hal - Hal Yang Berpengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha

Assessment dilakukan dengan berdasarkan berbagai faktor seperti faktor seperti analisis kekuatan kondisi keuangan maupun non keuangan serta pencapaian kinerja. Selain itu Perseroan melakukan analisis *Strength Weakness Opportunity Threat* (SWOT). Secara rinci, analisis SWOT Perseroan adalah sebagai berikut:



Memperhatikan analisa SWOT tersebut, disusun matriks *Threat Opportunity Weakness Strength* (TOWS) sebagai berikut:



Manajemen Perseroan telah melakukan penilaian atas kemampuan Bank untuk melanjutkan kelangsungan usahanya dan berkeyakinan bahwa Perseroan memiliki sumber daya untuk melanjutkan usahanya di masa mendatang. Selain itu, manajemen Perseroan tidak melihat adanya ketidakpastian material yang dapat menimbulkan keraguan yang signifikan terhadap kemampuan Perseroan untuk melanjutkan usahanya.

Asumsi yang Digunakan Manajemen dalam Melakukan Assessment

Strategi yang telah disusun berdasarkan analisis SWOT akan berjalan dengan baik dengan asumsi - asumsi sebagai berikut:

1. Asumsi Ekonomi Makro pada akhir tahun 2024 diproyeksikan:
 - a. Pertumbuhan PDB sebesar 4,9% - 5,50% (yoy).
 - b. Suku bunga acuan BI 7 Days Repo 6,00%.
 - c. Laju inflasi 2,5% - 3,5%
 - d. Nilai tukar mata uang Rupiah adalah Rp14.600/USD.
 - e. Pertumbuhan kredit sebesar 11,00% (yoy).
 - f. Pertumbuhan dana pihak ketiga sebesar 9,50% (yoy).
2. Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang di inisiasi Pemerintah untuk mendukung kebijakan insentif usaha, program kesehatan, usaha korporasi, UMKM dan perlindungan sosial.
3. Memperkuat *positioning* Perseroan pada bisnis perumahan dan mengembangkan potensi pada ekosistem perumahan.
4. Kinerja keuangan yang baik selama 5 (lima) tahun terakhir.
5. Tingkat Kesehatan Perseroan pada Peringkat Komposit 2 (PK - 2) dengan kualifikasi Sehat. Tingkat. Kesehatan tersebut diperoleh dari hasil *self assessment* Perseroan dengan menggunakan data per 31 Desember 2023

Pengungkapan Kerangka Governansi, Pengelolaan dan Pengendalian Aspek Perpajakan

Perseroan mendapat penghargaan atas Sinergi dan Kontribusi Perpajakan pada tahun buku 2022 dari KPP Wajib Pajak Besar Empat yang diberikan pada tanggal 23 April tahun 2023. Perseroan senantiasa berkomitmen untuk memberikan kontribusinya kepada negara sekaligus menunaikan kewajiban terkait perpajakan. Sebagai wajib pajak badan dalam negeri, Perseroan berhak mendapatkan insentif dari Pemerintah berupa keringanan pajak. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (2b) UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang menyatakan bahwa wajib pajak dalam negeri:

1. Berbentuk Perseroan Terbuka;
2. Dengan jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia paling sedikit 40%; dan
3. Memenuhi persyaratan tertentu.

Dimana berdasarkan ketentuan di atas, Perseroan dapat memperoleh tarif sebesar 3% lebih rendah dari tarif sebesar 22% yang berlaku pada tahun pajak 2022, sehingga tarif pajak yang digunakan dalam perhitungan PPh Badan adalah 19%. Dengan adanya insentif pajak ini, pada tahun pelaporan 2023 Perseroan menyetorkan pajak sebesar Rp1.020 miliar kepada pemerintah.

Pembayaran pajak merupakan suatu perwujudan kewajiban dan peran serta Perseroan untuk turut berpartisipasi dalam menopang laju pertumbuhan nasional. Pendekatan Perseroan terhadap pajak didasari oleh kepatuhan pada seluruh peraturan perpajakan yang berlaku. Perseroan telah membangun kebijakan dan strategi pajak yang disetujui dan ditinjau oleh Direktur Keuangan dalam pelaporan SPT Tahunan PPh Badan. Strategi pajak ini ditinjau setiap tahun oleh Direktur Keuangan. Dalam pelaksanaan tata kelola pajak, Perseroan telah menetapkan proses yang komprehensif dan terstruktur, seperti:

1. Pejabat yang bertanggung jawab untuk menetapkan strategi pajak adalah Direktur Keuangan.
2. Kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan dituangkan melalui kebijakan perpajakan Perseroan disertai pengembangan aplikasi perpajakan serta *training* dan sosialisasi secara berkala.
3. Proses pengelolaan, monitor dan *review* pelaksanaan kewajiban perpajakan dilakukan oleh Departemen Perpajakan serta monitor secara berkala oleh Divisi Kepatuhan, Audit Internal, dan Audit Eksternal (Kantor Akuntan Publik).

Perseroan dalam kegiatan operasionalnya telah menjalankan Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) yang dilakukan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pemangku kepentingan yang terpenting dalam hal perpajakan adalah pemerintah melalui kantor pajak. Untuk itu, Perseroan senantiasa membina hubungan baik dengan otoritas perpajakan dan tidak pernah melakukan keterlambatan pembayaran kewajiban pajak dimana hal ini merupakan salah satu wujud Perseroan dalam menjaga keselarasan dan kewajiban serta patuh terhadap seluruh peraturan perpajakan yang berlaku. Perseroan hanya beroperasi di Indonesia, untuk itu laporan perpajakan hanya dilakukan untuk Indonesia. Perseroan belum pernah melakukan perubahan tahun fiskal. Berikut disampaikan kontribusi Perseroan melalui pembayaran pajak di tahun 2022-2023.

Tabel Pembayaran Pajak

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian Pajak	Tahun 2023	Tahun 2022
Pajak Penghasilan (PPH Badan)	1.020.952	1.001.840
PPH 21 Perorangan	531.783	414.720
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	24.307	18.032
Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)	0	12
Pajak Bumi dan Bangunan	365	5.103
Pajak Lainnya	1.566.439	935.023
Total	3.143.845	2.374.730

Respon Terhadap Perubahan Arah Kebijakan Moneter

Tahun 2023 kondisi perekonomian global masih dalam masa transisi pemulihan setelah pandemi Covid - 19 dengan laju pertumbuhan produk domestik bruto dunia yang lebih moderat dibandingkan tahun 2022.

Tingkat inflasi mulai menunjukkan penurunan walaupun lebih lambat dibandingkan perkiraan banyak pihak dan masih direspon secara agresif oleh sebagian bank sentral di seluruh dunia dengan kenaikan suku bunga acuan walaupun tidak seagresif tahun 2022. Tensi geopolitik seperti Rusia - Ukraina dan Palestina - Israel serta musim kemarau yang lebih panjang di beberapa belahan dunia membuat ketidakpastian global meningkat. Hal ini menyebabkan volatilitas tinggi pada nilai tukar USD/IDR yang kemudian direspon dengan kenaikan suku bunga oleh Bank Indonesia. Secara total suku bunga Bunga acuan BI 7 - day reverse repo sudah naik sebanyak 50 bps sejak awal tahun 2023 dan membuat imbal hasil SBN 10 tahun bergerak cukup fluktuatif di kisaran 6,2% hingga 7,2%.

Bank menyusun strategi untuk meminimalisir dampak perubahan kebijakan moneter pada *performance* Bank antara lain dengan:

1. Mengurangi durasi portofolio surat berharga negara untuk meminimalisir dampak volatilitas imbal hasil pada valuasi harga aset surat berharga negara.
2. Melakukan rekomposisi sebagian aset pendapatan tetap bertenor pendek dari *coupon - paying bond* menjadi *zero coupon bond* untuk meningkatkan *fee - based income*.
3. Meningkatkan pendapatan bunga surat berharga melalui penambahan investasi surat berharga portofolio HTM.
4. Melakukan diversifikasi portofolio investasi untuk mengurangi dampak volatilitas *market* yang tinggi yang bertujuan untuk menambah pendapatan FBI dengan investasi pada produk reksadana pendapatan tetap terproteksi.

Transaksi Spot Dan Transaksi Derivatif

Transaksi *spot* dan transaksi derivatif periode tahun 2022 - 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel Laporan Transaksi Spot dan Transaksi Derivatif

(dalam jutaan Rupiah)

No	Transaksi	BANK				
		2023				
		Nilai Notional	Tujuan		Tagihan dan Kewajiban Derivatif	
Trading	Hedging		Tagihan	Kewajiban		
A. Terkait dengan Nilai Tukar						
1.	Spot	-	-	-	-	-
2.	Forward	-	-	-	-	-

No	Transaksi	BANK				
		2023				
		Nilai Notional	Tujuan		Tagihan dan Kewajiban Derivatif	
			Trading	Hedging	Tagihan	Kewajiban
3.	Option a. Jual b. Beli	-	-	-	-	-
4.	Future	-	-	-	-	-
5.	Swap	-	-	-	-	-
6.	Lainnya (CCS)	1.878.434			64.516	
B. Terkait dengan Suku Bunga						
1.	Forward	-	-	-	-	-
2.	Option a. Jual b. Beli	-	-	-	-	-
3.	Future	-	-	-	-	-
4.	Swap	-	-	-	-	-
5.	Lainnya	-	-	-	-	-
C.	Lainnya	-	-	-	-	-
	Jumlah	1.878.434	-	-	64.516	-

No	Transaksi	BANK				
		2022				
		Nilai Notional	Tujuan		Tagihan dan Kewajiban Derivatif	
Trading	Hedging		Tagihan	Kewajiban		
A. Terkait dengan Nilai Tukar						
1.	Spot	-	-	-	-	-
2.	Forward	-	-	-	-	-
3.	Option a. Jual b. Beli	-	-	-	-	-
4.	Future	-	-	-	-	-
5.	Swap	1.551.000	-	-	14.029	-
6.	Lainnya (CCS)	1.892.220	-	-	77.945	-
B. Terkait dengan Suku Bunga						
1.	Forward	-	-	-	-	-
2.	Option a. Jual b. Beli	-	-	-	-	-

No	Transaksi	BANK				
		2022				
		Nilai Notional	Tujuan		Tagihan dan Kewajiban Derivatif	
			Trading	Hedging	Tagihan	Kewajiban
3.	Future	-	-	-	-	-
4.	Swap	-	-	-	-	-
5.	Lainnya	-	-	-	-	-
C.	Lainnya	-	-	-	-	-
	Jumlah	3.443.220	-	-	91.975	

Laporan Penggunaan Tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN)

Berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-2/MBU/03/2023 Tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara Tambahan Penyertaan Modal Negara (PNM) adalah pemisahan kekayaan negara dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dijadikan modal BUMN dan/atau Perseroan Terbatas dan dikelola secara korporasi. Sesuai ketentuan pada Pasal 110 PER-2/MBU/03/2023:

- (1) Tambahan PMN dilakukan dengan tujuan untuk:
 - a. Memperbaiki struktur permodalan BUMN atau Perseroan Terbatas; dan/atau
 - b. Meningkatkan kapasitas usaha BUMN atau Perseroan Terbatas.
- (2) Tambahan PMN kepada BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam rangka:
 - a. Melaksanakan penugasan Pemerintah kepada BUMN;
 - b. Melakukan restrukturisasi dan/atau penyelamatan BUMN; dan/atau
 - c. Melakukan pengembangan usaha BUMN

Dasar Penggunaan Dana PMN

Seluruh dana penambahan PMN sebesar Rp2.479.999.977.600,- (dua triliun empat ratus tujuh puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus Rupiah) ditambah dengan hasil *rights issue* porsi publik akan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan dalam meningkatkan penyaluran jumlah kredit dan/atau pinjaman.

Penguatan Permodalan Perseroan

Dalam rangka mendukung peningkatan kapasitas bisnis dan memperkuat peran Perseroan dalam ekosistem perumahan, terdapat beberapa regulasi yang dipertimbangkan salah satunya adalah regulasi permodalan, di mana dalam kondisi normal Perseroan perlu menjaga rasio kecukupan modal/*Capital Adequacy Ratio* (CAR) sebesar 15,40%.

Total Investasi yang Diperlukan

Perseroan memproyeksikan realisasi pembiayaan unit rumah (KPR) sebanyak 1,3 juta unit di tahun 2021 hingga tahun 2025, dengan proyeksi peningkatan *disbursement* (penyaluran) kredit rata-rata sebesar 21,32% per tahun (2021-2025) yang realisasinya akan berdampak pada kenaikan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) dan kebutuhan permodalan Perseroan. Dengan, memperhatikan ketentuan mengenai kecukupan modal, diperlukan peningkatan Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk memperbaiki struktur modal sekaligus meningkatkan kapasitas usaha melalui peningkatan modal inti (*Tier 1*) agar rasio CAR dapat dijaga sesuai ketentuan. Mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, diharapkan penambahan modal sebesar Rp4,13 triliun melalui mekanisme *rights issue*/privatisasi dengan PMN sebesar Rp2,48 triliun dan porsi publik sebesar Rp1,65 triliun. Dengan adanya *rights issue*/privatisasi tersebut, Perseroan akan mampu mempertahankan kebutuhan modal di atas 16% sampai dengan 2025 (di atas Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) yang disyaratkan OJK, yaitu sebesar 15,40%) serta mencegah terjadinya delusi kepemilikan Negara di bawah 60%.

Total Tambahan PMN yang Dialokasikan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Tabungan Negara Tbk. Total PMN yang diberikan kepada Perseroan adalah paling banyak sebesar Rp2.480.000.000.000,- (dua triliun empat ratus delapan puluh miliar rupiah). Dalam pelaksanaan *rights issue*/privatisasi tahun 2022 dengan memperhatikan agar kepemilikan saham Pemerintah tetap sebesar 60% jumlah saham dan harga pelaksanaan *rights issue*, maka jumlah PMN yang dicairkan sebesar Rp2.479.999.977.600,- (dua triliun empat ratus tujuh puluh sembilan miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus Rupiah).

Penjelasan Progres Penggunaan Dana

Dana tambahan PMN melalui mekanisme *rights issue*/privatisasi dengan PMN sebesar Rp2.479.999.977.600,- (dua triliun empat ratus tujuh puluh sembilan miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus Rupiah) ditambah dengan dana dari publik sebesar Rp1.653.333.318.000 (satu triliun enam ratus lima puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus delapan belas ribu Rupiah) seluruhnya disetorkan ke dalam Modal Perseroan setelah dikurangi dengan biaya emisi. Sehingga terjadi perubahan struktur modal sebagai berikut:

Sebelum Rights Issue				Setelah Right Issue					
		Nilai Nominal Rp500,- per saham				Nilai Nominal Rp500,- per saham			
		Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)			Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)		
Modal Dasar		20.478.432.000	10.239.216.000.000	Modal Dasar		20.478.432.000	10.239.216.000.000		
Jumlah Modal Ditempatkan dan disetor				Jumlah Modal Ditempatkan dan disetor					
• Pemerintah RI • Publik	6.354.000.000	3.177.000.000.000	60,00%	• Pemerintah RI • Publik	8.420.666.648	4.210.333.324.000	60,00%		
	4.236.000.000	2.118.000.000.000	40,00%		5.613.777.765	2.806.888.882.500	40,00%		
		10.590.000.000	5.295.000.000.000	100,00%			14.034.444.413	7.017.222.206.500	100,00%
Sisa saham dalam portepel	9.888.432.000	4.944.216.000.000		Sisa saham dalam portepel	6.443.987.587	3.221.993.793.500			
*) Berdasarkan Perubahan Anggaran Dasar Nomor 08, tanggal 8 April 2021				Hasil Pelaksanaan Rights Issue BBTN yang terserap seluruhnya menjadikan sisa saham dalam portepel menjadi 6.443.987.587 lembar.					
Saham yang akan diterbitkan merupakan sisa saham dalam portepel, di mana posisi terdapat 9.888.432.000 miliar lembar saham.									

Kendala Rencana dan Tindak Lanjut

Adapun beberapa kendala atas pelaksanaan *rights issue*/privatisasi adalah sebagai berikut:

- Proses pelaksanaan yang cukup ketat selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, sejak pelaksanaan *kick off meeting* lembaga dan/atau profesi penunjang pada tanggal 3 Oktober 2022. Mengingat PMN menggunakan APBN Anggaran Tahun 2022, proses *rights issue* harus terlaksana pada tahun 2022.
- *Trading period* berlangsung mulai tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan 5 Januari 2023. Proses *trading period* yang berjalan pada pengujung tahun 2022 tersebut, menyebabkan transaksi *rights issue* BBTN cukup sepi pada 3 (tiga) hari perdagangan pertama. Hal

tersebut dikarenakan banyak investor asing dan beberapa *fund manager* yang telah menyelesaikan semua transaksi untuk aksi korporasi perdagangan tahun 2022.

Namun demikian, hal tersebut dapat diselesaikan dengan beberapa tindak lanjut dari tim privatisasi yaitu:

- Melakukan *monitoring* yang ketat atas pelaksanaan progress *rights issue*/privatisasi secara mingguan dan memastikan bahwa pelaksanaan telah berjalan dengan tepat waktu.
- Koordinasi secara intens dengan tim *sales* sekuritas terkait dengan minat investor asing yang akan melakukan *exercise rights issue* BBTN sejak awal.



INFORMASI EKSPOSUR RISIKO DAN PERMODALAN



“

Perseroan senantiasa menghubungkan tujuan keuangan dan kecukupan modal terhadap risiko sehingga bisnis Perseroan sejalan dengan permodalan dan persyaratan likuiditas Perseroan.



Sesuai dengan kompleksitas usahanya, Bank telah mengelola 8 (delapan) jenis risiko yaitu risiko kredit, risiko likuiditas, risiko pasar, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko stratejik dan risiko kepatuhan. Namun bagian ini hanya menjelaskan tentang praktik manajemen risiko untuk risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional. Sedangkan untuk penjelasan terkait dengan jenis - jenis risiko lainnya disajikan dalam bagian Profil Risiko dan Pengelolaannya pada *Corporate Governance* dalam Laporan Tahunan ini.

Risiko Kredit

Sebagai bagian dari pengelolaan risiko kredit, Bank secara teratur meninjau dan memperbarui Pedoman Kebijakan Kredit dan Pembiayaan untuk kredit Bank dan pembiayaan sebagai bagian dari proses penilaian risiko. Eksposur Risiko Kredit dipantau sejak proses pemberian kredit sampai dengan jatuh tempo kredit. Pemantauan dan pengendalian risiko kredit di antaranya dengan mengevaluasi eksposur risiko kredit terhadap limit risiko kredit (*Risk Appetite and Risk Tolerance*). Direksi juga selalu memberikan arahan kepada seluruh pegawai agar dalam penerapan pencapaian kinerja dan tetap berpedoman pada *Good Corporate Governance*, aspek Kepatuhan terhadap SOP, ketentuan regulator yang berlaku serta senantiasa meningkatkan pengendalian internal (internal control), yang diimplementasikan oleh seluruh unit kerja.

Bank secara aktif melakukan Forum *Portfolio Quality Review* bersama Direksi, Divisi, CBC, Kantor Cabang secara bulanan atau bila diminta sewaktu-waktu sebagai upaya memberikan gambaran terkini mengenai posisi dan kualitas kredit baik secara bankwide maupun per segmentasi kredit. Dalam hal peningkatan proses pengambilan keputusan pemberian kredit, Bank juga melakukan pembentukan komite kredit melalui Rapat Komite Kredit disertai dengan sentralisasi proses kredit. Pada segmen kredit komersial, Bank telah mengimplementasikan *Commercial Banking Center* (CBC) dimana CBC berfungsi sebagai sentralisasi pemrosesan kredit komersial. Pada segmen SME, Bank juga sedang melakukan implementasi SPU (Sentra Proses UMKM)

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 37/POJK.03/2019 Tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Pasal 25 ayat (1) b. Bank wajib menambahkan laporan informasi eksposur risiko dan permodalan pada laporan publikasi keuangan dan informasi kinerja keuangan tahunan.

sebagai upaya perbaikan proses dan pengelolaan kredit UMKM untuk meningkatkan produktivitas, perbaikan kualitas putusan kredit yang tersentral dan objektif, serta monitoring yang tersentralisasi. Bank juga mulai menerapkan *Portfolio Guideline* untuk Kredit *Wholesale* sebagai pengendalian risiko konsentrasi kredit dengan tetap mengedepankan asas prudent dan governance. Bank melakukan beberapa pengembangan sistem seperti pada segment SME dikembangkan sistem *Credit Scoring Model* SME dan pada segment kredit UMKM, Komersial dan Korporasi sedang dikembangkan *Early Warning System* (EWS).

Sebagai tindak lanjut penerapan Pilar 1 Basel II, Bank mengimplementasikan pengukuran risiko kredit dengan menggunakan *Standardized Approach* sesuai dengan ketentuan SE OJK No. 24/SEOJK.03/2021 tanggal 7 Oktober 2021 perihal Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Kredit dengan menggunakan Pendekatan Standar bagi Bank Umum yang telah efektif diberlakukan pada Januari 2023.

Uraian terkait pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah, Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak, Tagihan Bersih Berdasarkan Sektor Ekonomi, Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Wilayah, Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Sektor Ekonomi, serta Rincian Mutasi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

(dalam jutaan Rupiah)

No	Kategori Portofolio*)	31 Desember 2023				
		Jabodetabek	Jawa Non-Jabodetabek	Sumatera	Lain-lain*	Jumlah
1	Tagihan kepada Pemerintah	85.096.880	-	-	-	85.096.880
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	16.258.302	-	-	-	16.258.302

No	Kategori Portofolio*)	31 Desember 2023				
		Jabodetabek	Jawa Non-Jabodetabek	Sumatera	Lain-lain*	Jumlah
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	3.585.265	-	200	-	3.585.466
5	Tagihan berupa <i>Covered Bond</i>	-	-	-	-	-
6	Tagihan Kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	21.184	-	-	-	21.184
7	Tagihan berupa Surat Berharga/ Piutang Subordinasi, Ekuitas, dan Instrumen Modal Lainnya	-	-	-	-	-
8	Kredit Beragun Rumah Tinggal	84.877.769	96.502.378	39.892.528	47.431.589	268.704.264
9	Kredit Beragun Properti Komersial	1.785.515	2.258.633	1.040.216	859.089	5.943.455
10	Kredit untuk Pengadaan Tanah, Pengelolaan Tanah, dan Konstruksi	6.875.579	6.682.179	1.119.130	1.193.983	15.870.870
11	Kredit Pegawai/Pensiunan	595.920	836.300	296.635	544.809	2.273.664
12	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	1.617.979	1.991.362	873.226	2.266.915	6.749.481
13	Tagihan Kepada Korporasi	12.973.940	5.553.904	187.497	332.616	19.047.958
14	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	1.876.514	2.572.446	1.240.140	1.134.025	6.823.125
15	Aset Lainnya	8.426.922	2.836.119	916.336	1.328.134	13.507.510
	Jumlah	223.991.770	119.233.322	45.565.907	55.091.160	443.882.159

(dalam jutaan Rupiah)

No	Kategori Portofolio **)	31 Desember 2022				
		Jabodetabek	Jawa Non-Jabodetabek	Sumatera	Lain-lain*	Jumlah
1	Tagihan kepada Pemerintah	70.895.488	-	-	1.434.190	72.329.678
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	13.690.300	-	-	1	13.690.301
3	Tagihan kepada - Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank	1.818.586	88.212	3.949	22	1.910.769
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	105.349.316	59.258.376	35.893.913	41.218.217	241.719.822
6	Kredit Beragun Properti Komersial	10.186.557	4.448.983	1.438.177	1.794.914	17.868.631
7	Kredit Pegawai atau Pensiunan	666.599	480.515	251.052	283.852	1.682.018
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	2.344.084	1.995.649	945.301	2.022.710	7.307.744
9	Tagihan kepada Korporasi	9.562.331	3.356.354	1.521.504	670.901	15.111.090
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	1.637.940	875.697	662.386	488.960	3.664.982
11	Aset Lainnya	5.998.451	2.471.875	768.995	1.169.363	10.408.685
	Jumlah	222.149.650	72.975.662	41.485.278	49.083.130	385.693.720

* Lain-lain terdiri dari Kalimantan, Sulawesi, Bali, Maluku dan Papua

**) Mengacu pada SE OJK No. 42/SEOJK.03/2016 tentang Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko Untuk Risiko Kredit Dengan Menggunakan Pendekatan Standar.

Tabel Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

(dalam jutaan Rupiah)

No.	Kategori Portofolio*)	31 Desember 2023					
		<1 tahun	> 1 tahun s.d 3 tahun	> 3 tahun s.d 5 tahun	>5 tahun	Non Kontraktual	Jumlah
1	Tagihan kepada Pemerintah	15.151.432	269.429	261.182	69.336.021	78.815	85.096.880
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	30.435	4.586.955	2.644.791	8.996.121	-	16.258.302
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	3.585.265	-	-	200	3.585.466
5	Tagihan berupa Covered Bond	-	-	-	-	-	-
6	Tagihan Kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	-	-	21.184	-	-	21.184
7	Tagihan berupa Surat Berharga/ Piutang Subordinasi, Ekuitas, dan Instrumen Modal Lainnya	-	-	-	-	-	-
8	Kredit Beragun Rumah Tinggal	40.747	465.866	1.290.499	266.907.152	-	268.704.264
9	Kredit Beragun Properti Komersial	879	719.292	2.752.187	2.471.097	-	5.943.455
10	Kredit untuk Pengadaan Tanah, Pengelolaan Tanah, dan Konstruksi	170.165	2.910.150	5.153.943	7.636.612	-	15.870.870
11	Kredit Pegawai/Pensiunan	-	2.967	36.190	2.234.508	-	2.273.664
12	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	13.846	659.235	1.462.900	4.613.500	-	6.749.481
13	Tagihan Kepada Korporasi	244.092	5.289.012	842.170	12.672.684	-	19.047.958
14	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	3.619	67.820	771.847	5.979.840	-	6.823.125
15	Aset Lainnya	-	-	-	-	13.507.510	13.507.510
	Jumlah	15.655.214	18.555.991	15.236.892	380.847.535	13.586.526	443.882.159

*) Mengacu pada SE OJK No. 24/SEOJK.03/2021 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko Untuk Risiko Kredit Dengan Menggunakan Pendekatan Standar Bagi Bank Umum.

Tabel Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sektor Ekonomi per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

31 Desember 2023

No.	Sektor Ekonomi *)	Tagihan kepada Pemerintah	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	Tagihan Kepada Bank	Tagihan berupa Covered Bond	Tagihan Kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya
1	Pertanian, Perburuan, Kehutanan	-	24.735	-	-	-	-
2	Perikanan	-	-	-	-	-	-
3	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-	-
4	Industri Pengolahan	-	-	-	-	-	-
5	Listrik, Gas dan Air	-	4.062.541	-	-	-	-
6	Konstruksi	67.820.260	1.957.351	-	-	-	-
7	Perdagangan Besar dan Eceran	-	5.403.719	-	-	-	21.184
8	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makanan Minum	-	-	-	-	-	-
9	Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	-	3.531.548	-	-	-	-
10	Perantara Keuangan	17.197.805	468.280	-	3.585.466	-	-
11	Real Estate, Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan	-	-	-	-	-	-

(dalam jutaan Rupiah)

No.	Kategori Portofolio**)	31 Desember 2022					
		<1 tahun	> 1 tahun s.d 3 tahun	> 3 tahun s.d 5 tahun	>5 tahun	Non Kontraktual	Jumlah
1	Tagihan Kepada Pemerintah	63.014.308	3.804.916	4.435.399	1.075.055	-	72.329.678
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	2.938.867	1.923.525	1.319.844	7.508.065	-	13.690.301
3	Tagihan Kepada - Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	1.434.412	397.077	79.280	-	-	1.910.769
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	2.808.220	6.875.512	15.847.782	216.188.307	-	241.719.822
6	Kredit Beragun Properti Komersial	8.602.033	6.950.019	1.967.901	348.678	-	17.868.631
7	Kredit Pegawai atau Pensiunan	159.460	125.153	417.149	980.256	-	1.682.018
8	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	1.440.168	2.163.613	1.370.840	2.333.122	-	7.307.744
9	Tagihan Kepada Korporasi	5.108.151	4.481.809	1.721.739	3.799.390	-	15.111.090
10	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	1.297.454	892.497	285.554	1.189.477	-	3.664.982
11	Aset Lainnya	-	-	-	-	10.408.685	10.408.685
	Jumlah	86.803.073	27.614.121	27.445.487	233.422.351	10.408.685	385.693.720

**) Mengacu pada SE OJK No. 42/SEOJK.03/2016 tentang Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko Untuk Risiko Kredit Dengan Menggunakan Pendekatan Standar.

(dalam jutaan Rupiah)

Tagihan berupa Surat Berharga/ Piutang Subordinasi, Ekuitas, dan Instrumen Modal Lainnya	Kredit Beragun Rumah Tinggal	Kredit Beragun Properti Komersial	Kredit untuk Pengadaan Tanah, Pengelolaan Tanah, dan Konstruksi	Kredit Pegawai/ Pensiunan	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	Tagihan Kepada Korporasi	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	Aset Lainnya
-	-	-	-	-	32.000	43.000	78	-
-	-	-	-	-	8.681	-	-	-
-	-	-	-	-	2.032	3.163.404	5.132	-
-	-	-	17.937	-	69.817	603.374	975	-
-	-	-	-	-	28.027	1.928.798	642	-
-	58.818	3.765.987	15.494.003	-	157.178	5.947.347	2.565.174	-
-	-	446.324	229.725	-	1.184.037	854.437	49.739	-
-	-	-	-	-	187.829	236.189	26.361	-
-	-	-	-	-	38.501	596.845	1.306	-
-	-	-	-	-	1.698	1.354.244	614	-
-	-	1.252.400	72.329	-	76.050	1.858.942	159.964	-



No.	Sektor Ekonomi *)	Tagihan kepada Pemerintah	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	Tagihan Kepada Bank	Tagihan berupa Covered Bond	Tagihan Kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya
12	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-	-	-	-	-	-
13	Jasa Pendidikan	-	-	-	-	-	-
14	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-	-	-	-	-	-
15	Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan Lainnya	-	-	-	-	-	-
16	Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga	-	-	-	-	-	-
17	Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	-	-	-	-
18	Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya	-	-	-	-	-	-
19	Bukan Lapangan Usaha	-	-	-	-	-	-
20	Lainnya	78.815	810.128	-	-	-	-
	Jumlah	85.096.880	16.258.302	-	3.585.466	-	21.184

*) Mengacu pada SE OJK No. 24/SEOJK.03/2021 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko Untuk Risiko Kredit Dengan Menggunakan Pendekatan Standar Bagi Bank Umum.

31 Desember 2022

No.	Sektor Ekonomi **)	Tagihan Kepada Pemerintah	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	Tagihan Kepada - Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	Tagihan Kepada Bank
1	Pertanian, Perburuan, Kehutanan	-	-	-	-
2	Perikanan	-	-	-	-
3	Pertambangan dan Penggalian	707.070	-	-	-
4	Industri Pengolahan	-	-	-	-
5	Listrik, Gas dan Air	139.817	3.505.119	-	-
6	Konstruksi	10.608.026	2.298.552	-	-
7	Perdagangan Besar dan Eceran	-	1.149.653	-	-
8	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makanan Minum	-	-	-	-
9	Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	73.929	4.052.332	-	-
10	Perantara Keuangan	45.607.636	2.050.455	-	1.257.077
11	Real Estate, Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan	-	-	-	-
12	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-	-	-	-
13	Jasa Pendidikan	-	-	-	-
14	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	-	-	-	-
15	Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan Lainnya	-	505.982	-	-
16	Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga	-	-	-	-
17	Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	-	-
18	Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya	-	-	-	-
19	Bukan Lapangan Usaha	-	-	-	-
20	Lainnya	15.193.200	128.208	-	653.692
	Jumlah	72.329.678	13.690.301	-	1.910.769

**) Mengacu pada SE OJK No. 42/SEOJK.03/2016 tentang Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko Untuk Risiko Kredit Dengan Menggunakan Pendekatan Standar.

Tagihan berupa Surat Berharga/ Piutang Subordinasi, Ekuitas, dan Instrumen Modal Lainnya	Kredit Beragun Rumah Tinggal	Kredit Beragun Properti Komersial	Kredit untuk Pengadaan Tanah, Pengelolaan Tanah, dan Konstruksi	Kredit Pegawai/ Pensiunan	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	Tagihan Kepada Korporasi	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	Aset Lainnya
-	-	-	-	-	-	1.488.237	-	-
-	-	-	-	-	17.085	148.861	2.907	-
-	-	-	-	-	32.585	43.975	-	-
-	-	-	-	-	58.206	89.962	3.932	-
-	217.374.674	376.690	-	9.298	28.251	-	3.165.825	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	124.587	458.492	991	-
-	34.009.517	35.897	56.877	-	163.255	-	-	-
-	17.261.254	66.156	-	2.264.366	4.539.662	231.851	839.484	13.507.510
-	268.704.264	5.943.455	15.870.870	2.273.664	6.749.481	19.047.958	6.823.125	13.507.510

(dalam jutaan Rupiah)

Kredit Beragun Rumah Tinggal	Kredit Beragun Properti Komersial	Kredit Pegawai atau Pensiunan	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	Tagihan Kepada Korporasi	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	Aset Lainnya
-	-	-	230.352	912	-	-
-	44.672	-	23.945	37.778	19	-
-	-	-	2.142	10.990	4.439	-
-	-	-	49.224	658.421	353	-
-	-	-	8.241	114.636	67	-
-	17.779.288	-	385.273	5.277.802	1.772.817	-
-	-	-	393.539	769.859	44.925	-
-	-	-	40.357	449.968	32.013	-
-	-	-	7.540	483.661	3.688	-
-	-	-	392.518	637.355	267	-
-	44.672	-	35.051	2.404.474	68.164	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	53.120	245.914	8.136	-
-	-	-	16.297	56.586	274	-
-	-	-	20.768	23.834	2.479	-
-	-	-	20.677	6.243	2.802	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	34.389	498.657	2.703	-
241.719.822	-	1.682.018	5.593.232	2.736.288	1.721.837	-
-	-	-	1.078	697.714	-	10.408.685
241.719.822	17.868.631	1.682.018	7.307.744	15.111.090	3.664.982	10.408.685



**Tabel Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Wilayah
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2023			
		Jabodetabek	Jawa Non-Jabodetabek	Sumatera	Lain-lain*
1	Tagihan	238.015.051	126.378.439	48.205.950	58.355.472
2	Tagihan yang mengalami peningkatan dan pemburukan risiko kredit (<i>Stage 2</i> dan <i>Stage 3</i>)	6.024.136	5.319.970	1.381.640	1.384.564
	a. Belum jatuh tempo	4.540.865	3.538.582	657.922	723.765
	b. Telah jatuh tempo	1.483.270	1.781.389	723.719	660.799
3	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) - Individual	4.180.045	4.578.686	1.097.470	1.190.983
4	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) - Kolektif	2.359.610	1.343.496	554.279	335.980
5	Tagihan yang dihapus buku	1.024.638	1.230.976	288.977	514.982

* Lain-lain terdiri dari Kalimantan, Sulawesi, Bali, Maluku

**Tabel Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Sektor Ekonomi
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

No.	Sektor Ekonomi	31 Desember 2023				
		Tagihan	Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai		CKPN - Individual	CKPN - Kolektif
			Belum Jatuh Tempo	Telah Jatuh Tempo		
1	Pertanian, Perburuan, Kehutanan	104.807	82	61	62	353
2	Perikanan	8.531	78	-	50	29
3	Pertambangan dan Penggalian	1.838.446	71	5.917	5.917	109
4	Industri Pengolahan	568.210	1.057	5.108	5.749	578
5	Listrik, Gas dan Air	5.006.747	4.745	502	502	4.853
6	Konstruksi	34.410.098	3.657.557	2.598.159	4.578.642	1.917.858
7	Perdagangan Besar dan Eceran	5.266.181	7.387	39.458	40.977	9.501
8	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makanan Minum	484.604	197.451	28.320	29.044	196.761
9	Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	4.356.782	233.831	1.129	7.182	227.778
10	Perantara Keuangan	20.084.700	293	11	68	8.170
11	Real Estate, Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan	3.663.500	804.534	108.894	506.186	417.043
12	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.180.000	6.120	-	-	6.120
13	Jasa Pendidikan	152.383	73.419	640	1.036	78.211
14	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	68.094	186	-	-	736
15	Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan Lainnya	130.203	637	70	197	510
16	Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga	214.100.606	4.115.658	1.431.516	4.482.671	1.064.503
17	Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	-	-	-
18	Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya	448.589	545	838	852	1.165

(dalam jutaan Rupiah)

31 Desember 2022						
	Jumlah	Jabodetabek	Jawa Non-Jabodetabek	Sumatera	Lain-lain*	Jumlah
	470.954.911	200.995.545	96.070.121	47.281.062	48.752.870	393.099.598
	14.110.311	7.564.838	3.082.356	1.334.572	1.504.680	13.486.447
	9.461.134	4.904.350	1.695.496	620.231	734.844	7.954.922
	4.649.177	2.660.488	1.386.860	714.341	769.836	5.531.525
	11.047.183	4.720.165	2.147.945	996.692	1.172.726	9.037.529
	4.593.364	3.965.316	1.407.240	462.656	404.949	6.240.160
	3.059.573	996.543	1.013.532	272.214	589.772	2.872.060

(dalam jutaan Rupiah)

		31 Desember 2022					
	Tagihan yang Dihapus Buku	Tagihan	Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai		CKPN - Individual	CKPN - Kolektif	Tagihan yang Dihapus Buku
			Belum Jatuh Tempo	Telah Jatuh Tempo			
	711	166.351	156	29	81	25.364	-
	-	29.068	55	0	-	18.792	214
	-	62.986	370	5.700	5.798	420	-
	-	604.090	960	6.036	6.207	1.587	15.073
	2.211	3.462.489	862	3.133	3.133	1.065	-
	871.721	39.139.058	3.819.669	3.445.780	4.800.058	3.368.432	845.151
	12.678	2.834.499	39.813	58.925	80.588	31.489	179.886
	631	506.597	240.091	87.788	94.036	240.193	39.647
	3.948	4.570.782	159.772	3.321	5.311	159.782	7.123
	-	38.028.844	277	22	22	261.490	7.122
	8.136	3.693.389	586.752	319.537	318.678	618.720	114.400
	-	-	-	-	-	-	-
	1.223	273.893	71.601	9.555	11.212	84.884	-
	760	1.045.028	474	652	660	6.105	-
	409	560.700	3.862	276	3.749	389	75.073
	1.125.415	27.632	317	2.576	3.702.061	915.532	1.374.956
	-	-	-	-	-	-	-
	3.922	438.627	2.992	392	320	3.794	100



No.	Sektor Ekonomi	31 Desember 2023				
		Tagihan	Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai		CKPN - Individual	CKPN - Kolektif
			Belum Jatuh Tempo	Telah Jatuh Tempo		
19	Bukan Lapangan Usaha	34.879.361	-	-	734.042	330.526
20	Lainnya	144.203.071	357.482	428.556	654.007	328.560
	Jumlah	470.954.911	9.461.134	4.649.177	11.047.183	4.593.364

**Tabel Pengungkapan Rincian Mutasi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

(dalam jutaan Rupiah)

No.	Keterangan	31 Desember 2023	
		CKPN Individual	CKPN Kolektif
1	Saldo awal CKPN	11.055.864	4.623.340
2	Pembentukan (pemulihan) CKPN pada periode berjalan (Net)	2.246.783	696.116
	2.a. Pembentukan CKPN pada periode berjalan	2.246.783	696.116
	2.b. Pemulihan CKPN pada periode berjalan	-	-
3	CKPN yang digunakan untuk melakukan hapus buku atas tagihan pada periode berjalan	(2.255.465)	(726.092)
4	Pembentukan (pemulihan) lainnya pada periode berjalan	-	-
	Saldo Akhir CKPN	11.047.183	4.593.364

Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Kategori Portofolio dan Skala Peringkat dan Risiko Kredit Pihak Lawan (*Counterparty Credit Risk*) dijabarkan sebagai berikut:

Tabel Tagihan Bersih Berdasarkan Kategori Portofolio dan Skala Peringkat

31 Desember 2023

No	Kategori Portofolio	Tagihan Bersih					
		Lembaga Pemeringkat	Peringkat Jangka Panjang				
		Standards and Poor's	AAA	AA+ s.d AA-	A+ s.d A-	BBB+ s.d BBB-	
		Fitch Ratings	AAA	AA+ s.d AA-	A+ s.d A-	BBB+ s.d BBB-	
		Moody's	Aaa	Aa1 s.d Aa3	A1 s.d A3	Baa1 s.d Baa3	
		PT Fitch Ratings Indonesia	AAA (idn)	AA+ (idn) s.d AA- (idn)	A+(idn) s.d A-(idn)	BBB+(idn) s.d BBB-(idn)	
		PT Pemeringkat Efek Indonesia	idAAA	idAA+ s.d idAA-	idA+ s.d idA-	idBBB+ s.d idBBB-	
1	Tagihan kepada Pemerintah	-	-	-	-		
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	2.332.828	4.060.685	601.890	6.882.528		
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-		
4	Tagihan Kepada Bank	-	(8)	-	-		
5	Tagihan berupa Covered Bond	-	-	-	-		
6	Tagihan Kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	-	-	-	-		
7	Tagihan berupa Surat Berharga/Piutang Subordinasi, Ekuitas, dan Instrumen Modal Lainnya	-	-	-	-		
8	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-		

31 Desember 2022							
	Tagihan yang Dihapus Buku	Tagihan	Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai		CKPN - Individual	CKPN - Kolektif	Tagihan yang Dihapus Buku
			Belum Jatuh Tempo	Telah Jatuh Tempo			
	224.726	238.391.712	2.809.797	1.456.815	5.615	393.912	144.114
	803.083	59.263.855	217.100	130.990	-	108.209	69.199
	3.059.573	393.099.598	7.954.922	5.531.525	9.037.529	6.240.160	2.872.060

(dalam jutaan Rupiah)

No.	Keterangan	31 Desember 2022	
		CKPN Individual	CKPN Kolektif
1	Saldo awal CKPN	8.336.777	6.174.981
2	Pembentukan (pemulihan) CKPN pada periode berjalan (Net)	2.968.511	1.070.996
	2.a. Pembentukan CKPN pada periode berjalan	2.968.511	1.070.996
	2.b. Pemulihan CKPN pada periode berjalan	-	-
3	CKPN yang digunakan untuk melakukan hapus buku atas tagihan pada periode berjalan	(2.275.374)	(596.686)
4	Pembentukan (pemulihan) lainnya pada periode berjalan	-	-
	Saldo Akhir CKPN	9.029.914	6.649.291

(dalam jutaan Rupiah)

	Tagihan Bersih								
	Peringkat Jangka Panjang			Peringkat Jangka Pendek				Tanpa Peringkat	Jumlah
	BB+ s.d BB-	B+ s.d B-	kurang dari B-	A-1	A-2	A-3	Kurang dari A-3		
	BB+ s.d BB-	B+ s.d B-	kurang dari B-	F1 s.d F1	F2	F3	Kurang dari F3		
	Ba1 s.d Ba3	B1 s.d B3	kurang dari B3	p-1	p-2	p-3	Kurang dari P-3		
	BB+(idn) s.d BB-(idn)	B+(idn) s.d B-(idn)	kurang dari B-(idn)	F1+(idn) s.d F1(idn)	F2(idn)	F3(idn)	Kurang dari F3(idn)		
	idBB+ s.d idBB-	idB+ s.d idB-	kurang dari idB-	idA1	idA2	idA3 s.d id A4	Kurang dari idA4		
	-	-	-	-	-	-	-	85.096.880	85.096.880
	655.294	-	147.721	-	-	-	-	1.577.356	16.258.302
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	1.233.550	-	-	-	2.351.924	3.585.466
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	21.184	-	-	-	-	21.184
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	268.704.264	268.704.264



No	Kategori Portofolio	Tagihan Bersih			
		Lembaga Pemeringkat	Peringkat Jangka Panjang		
		Standards and Poor's	AAA	AA+ s.d AA-	A+ s.d A- BBB+ s.d BBB-
		Fitch Ratings	AAA	AA+ s.d AA-	BBB+ s.d BBB-
		Moody's	Aaa	Aa1 s.d Aa3	Baa1 s.d Baa3
		PT Fitch Ratings Indonesia	AAA (idn)	AA+ (idn) s.d AA- (idn)	BBB+(idn) s.d BBB-(idn)
		PT Pemeringkat Efek Indonesia	idAAA	idAA+ s.d idAA-	idBBB+ s.d idBBB-
9	Kredit Beragun Properti Komersial		-	-	-
10	Kredit untuk Pengadaan Tanah, Pengelolaan Tanah, dan Konstruksi		-	-	-
11	Kredit Pegawai/Pensiunan		-	-	-
12	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel		-	-	-
13	Tagihan Kepada Korporasi		-	5.118.942	2.949.560
14	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo		-	-	-
15	Aset Lainnya		-	-	-

*) Mengacu pada SE OJK No. 24/SEOJK.03/2021 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko Untuk Risiko Kredit Dengan Menggunakan Pendekatan Standar Bagi Bank Umum.

31 Desember 2022

No	Kategori Portofolio	Tagihan Bersih			
		Lembaga Pemeringkat	Peringkat Jangka Panjang		
		Standards and Poor's	AAA	AA+ s.d AA-	A+ s.d A- BBB+ s.d BBB-
		Fitch Ratings	AAA	AA+ s.d AA-	BBB+ s.d BBB-
		Moody's	Aaa	Aa1 s.d Aa3	Baa1 s.d Baa3
		PT Fitch Ratings Indonesia	AAA (idn)	AA+ (idn) s.d AA- (idn)	BBB+(idn) s.d BBB-(idn)
		PT Pemeringkat Efek Indonesia	idAAA	idAA+ s.d idAA-	idBBB+ s.d idBBB-
1	Tagihan kepada Pemerintah		-	-	-
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik		-	112.332	-
3	Tagihan kepada - Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional		-	-	-
4	Tagihan kepada Bank		-	337.913	-
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal		-	-	-
6	Kredit Beragun Properti Komersial		-	-	-
7	Kredit Pegawai atau Pensiunan		-	-	-
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel		-	-	-
9	Tagihan kepada Korporasi		-	-	-
10	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo		-	-	-
11	Aset Lainnya		-	-	-

**) Mengacu pada SE OJK No. 42/SEOJK.03/2016 tentang Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko Untuk Risiko Kredit Dengan Menggunakan Pendekatan Standar.

	Tagihan Bersih								
	Peringkat Jangka Panjang			Peringkat Jangka Pendek				Tanpa Peringkat	Jumlah
	BB+ s.d BB-	B+ s.d B-	kurang dari B-	A-1	A-2	A-3	Kurang dari A-3		
	BB+ s.d BB-	B+ s.d B-	kurang dari B-	F1 s.d F1	F2	F3	Kurang dari F3		
	Ba1 s.d Ba3	B1 s.d B3	kurang dari B3	p-1	p-2	p-3	Kurang dari p-3		
	BB+(idn) s.d BB-(idn)	B+(idn) s.d B-(idn)	kurang dari B-(idn)	F1+(idn) s.d F1(idn)	F2(idn)	F3(idn)	Kurang dari F3(idn)		
	idBB+ s.d idBB-	idB+ s.d idB-	kurang dari idB-	idA1	idA2	idA3 s.d id A4	Kurang dari idA4		
	-	-	-	-	-	-	-	5.943.455	5.943.455
	-	-	-	-	-	-	-	15.870.870	15.870.870
	-	-	-	-	-	-	-	2.273.664	2.273.664
	-	-	-	-	-	-	-	6.749.481	6.749.481
	119.318	-	753.195	-	-	-	-	10.106.943	19.047.958
	-	-	-	-	-	-	-	6.823.125	6.823.125
	-	-	-	-	-	-	-	13.507.510	13.507.510

	Tagihan Bersih								
	Peringkat Jangka Panjang			Peringkat Jangka Pendek				Tanpa Peringkat	Jumlah
	BB+ s.d BB-	B+ s.d B-	kurang dari B-	A-1	A-2	A-3	Kurang dari A-3		
	BB+ s.d BB-	B+ s.d B-	kurang dari B-	F1 s.d F1	F2	F3	Kurang dari F3		
	Ba1 s.d Ba3	B1 s.d B3	kurang dari B3	p-1	p-2	p-3	Kurang dari P-3		
	BB+(idn) s.d BB-(idn)	B+(idn) s.d B-(idn)	kurang dari B-(idn)	F1+(idn) s.d F1(idn)	F2(idn)	F3(idn)	Kurang dari F3(idn)		
	idBB+ s.d idBB-	idB+ s.d idB-	kurang dari idB-	idA1	idA2	idA3 s.d id A4	Kurang dari idA4		
	23.543	-	-	-	-	-	-	70.871.945	70.895.488
	-	-	-	-	-	-	-	13.577.969	13.690.301
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	1.572.856	1.910.769
	-	-	-	-	-	-	-	241.719.822	241.719.822
	-	-	-	-	-	-	-	17.850.675	17.850.675
	-	-	-	-	-	-	-	1.682.018	1.682.018
	-	-	-	-	-	-	-	7.304.129	7.304.129
	-	-	-	-	-	-	-	14.024.660	14.024.660
	-	-	-	-	-	-	-	3.664.982	3.664.982
	-	-	-	-	-	-	-	10.408.685	10.408.685



Sedangkan untuk Risiko Kredit Pihak Lawan (*Counterparty Credit Risk*) terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Transaksi Derivatif *Over the Counter*

Perseroan tidak memiliki transaksi derivatif per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

2. Transaksi *Repo*

Uraian terkait Transaksi *Repo* dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel Transaksi *Repo*

(dalam jutaan Rupiah)

No	Kategori Portofolio *)	31 Desember 2023			
		Nilai Wajar SB <i>Repo</i>	Kewajiban <i>Repo</i>	Tagihan Bersih	ATMR
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	-
5	Tagihan Kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	-	-	-	-
6	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-
7	Tagihan Kepada Korporasi	-	-	-	-
	Jumlah	-	-	-	-

*) Mengacu pada SE OJK No. 24/SEOJK.03/2021 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko Untuk Risiko Kredit Dengan Menggunakan Pendekatan Standar Bagi Bank Umum.

(dalam jutaan Rupiah)

No	Kategori Portofolio **)	31 Desember 2022			
		Nilai Wajar SB <i>Repo</i>	Kewajiban <i>Repo</i>	Tagihan Bersih	ATMR
1	Tagihan kepada Pemerintah	-	-	-	-
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-
3	Tagihan kepada - Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank	-	-	-	-
5	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	-	-	-	-
6	Tagihan kepada Korporasi	-	-	-	-
	Jumlah	-	-	-	-

**) Mengacu pada SE OJK No. 42/SEOJK.03/2016 tentang Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko Untuk Risiko Kredit Dengan Menggunakan Pendekatan Standar.

3. Transaksi Reverse Repo

Perseroan tidak memiliki transaksi *Reverse Repo* per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022.

Tabel Transaksi *Reverse Repo*

(dalam jutaan Rupiah)

No	Kategori Portofolio *)	31 Desember 2023			
		Tagihan	CKPN	Tagihan Bersih	ATMR
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	
3	Tagihan Kepada - Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	
4	Tagihan Kepada Bank	-	-	-	
5	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	-	-	-	
6	Tagihan Kepada Korporasi	-	-	-	
	Jumlah	-	-	-	-

*) Mengacu pada SE OJK No. 24/SEOJK.03/2021 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko Untuk Risiko Kredit Dengan Menggunakan Pendekatan Standar Bagi Bank Umum.

(dalam jutaan Rupiah)

No	Kategori Portofolio **)	31 Desember 2022			
		Tagihan	CKPN	Tagihan Bersih	ATMR
1	Tagihan kepada Pemerintah	1.434.190	-	1.434.190	-
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-
3	Tagihan kepada - Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank	-	-	-	-
5	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-
6	Tagihan kepada Korporasi	-	-	-	-
	Jumlah	1.434.190	-	1.434.190	-

**) Mengacu pada SE OJK No. 42/SEOJK.03/2016 tentang Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko Untuk Risiko Kredit Dengan Menggunakan Pendekatan Standar.

Dalam rangka menurunkan eksposur risiko kredit, Perseroan melakukan *pre-screening* terhadap debitur, mewajibkan debitur memenuhi agunan yang dipersyaratkan, menganalisis dan mengevaluasi kelayakan kredit, dan melakukan pengikatan kredit secara legal. Perseroan telah mengalokasikan eksposur kredit berdasarkan area/wilayah geografis tempat mereka

beroperasi dan mengalokasikan eksposur kredit berdasarkan sektor industri untuk melihat konsentrasi risiko kredit. Uraian terkait pengungkapan tagihan bersih berdasarkan bobot risiko setelah memperhitungkan dampak mitigasi risiko kredit dan pengungkapan tagihan bersih dan teknik mitigasi risiko kredit diuraikan sebagai berikut.



Tabel Tagihan Bersih Berdasarkan Bobot Risiko setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit per 31 Desember 2023 dan 30 Juni 2022

31 Desember 2023

No.	Kategori Portofolio *)	Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit						
		0%	20%	25%	35%	40%	50%	
A Eksposur Neraca								
1	Tagihan kepada Pemerintah	84.993.137	-	-	-	-	-	
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	7.640.801	-	-	-	7.279.886	
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	
4	Tagihan Kepada Bank	-	2.702.861	-	-	732.366	-	
5	Tagihan berupa <i>Covered Bond</i>	-	-	-	-	-	-	
6	Tagihan Kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	-	-	-	-	-	-	
7	Tagihan berupa Surat Berharga/Piutang Subordinasi, Ekuitas, dan Instrumen Modal Lainnya	-	-	-	-	-	-	
8	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	27.953.501	24.576.403	88.792.969	78.815.289	47.035.119	
9	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	308.887	
10	Kredit untuk Pengadaan Tanah, Pengelolaan Tanah, dan Konstruksi	-	-	-	-	-	-	
11	Kredit Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-	-	2.273.660	
12	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	-	
13	Tagihan Kepada Korporasi	-	4.290.164	-	-	-	2.472.014	
14	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	-	
15	Aset Lainnya	2.127.490	-	-	-	-	-	
	Jumlah Eksposur Neraca	87.120.627	42.587.327	24.576.403	88.792.969	79.547.655	59.369.566	
B Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif								
1	Tagihan Kepada Pemerintah	103.743	-	-	-	-	-	
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	271.826	-	-	-	262.774	
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	
4	Tagihan kepada Bank	-	-	-	-	-	-	
5	Tagihan Kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	-	-	-	-	450	-	
6	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	472	403	1.575	1.492	821	
7	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	7.955	
8	Kredit untuk Pengadaan Tanah, Pengelolaan Tanah, dan Konstruksi	-	-	-	-	-	-	
9	Kredit Pegawai/Pensiunan	-	-	-	-	-	4	
10	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	-	
11	Tagihan Kepada Korporasi	-	889.687	-	-	-	512.642	
12	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah Eksposur TRA	103.743	1.161.985	403	1.575	1.942	784.196	
C Eksposur akibat Kegagalan Pihak Lawan (<i>Counterparty Credit Risk</i>)								
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-	-	-	
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	-	
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	
4	Tagihan kepada Bank	-	-	-	-	-	-	
5	Tagihan Kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	-	-	-	-	-	-	

(dalam jutaan Rupiah)

	Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit							ATMR	Beban Modal
	60%	70%	75%	85%	100%	150%	Lainnya		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	632.464	142.575	-	5.573.249	511.624
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	833.519	76.517
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	20.734	-	-	-	-	8.294	761
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	882.179	644.029	-	-	-	-	70.123.127	6.437.303
	19.734	-	524.042	1.921.544	-	-	3.020.934	4.853.986	445.596
	-	-	-	-	13.310.791	1.722.657	-	15.879.575	1.457.745
	-	-	-	-	-	-	-	1.136.830	104.361
	-	-	3.566.851	1.515.198	163.255	-	1.500.537	4.567.635	419.309
	-	-	-	1.161.199	7.267.962	631.250	-	10.209.652	937.246
	-	-	-	-	3.806.223	3.012.844	-	8.325.489	764.280
	-	-	-	-	11.302.430	77.591	-	11.418.815	1.048.247
	19.734	882.179	4.755.656	4.597.941	36.483.126	5.586.916	4.521.472	132.930.171	12.202.989
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	22.829	5.146	-	216.301	19.856
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	180	17
	-	12	-	-	-	-	-	1.260	116
	-	-	13.079	49.484	-	-	77.796	124.384	11.418
	-	-	-	-	739.001	98.421	-	885.788	81.315
	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	-	-	1.948	872	-	-	820	2.443	224
	-	-	-	240.808	1.451.323	130.908	-	2.254.449	206.958
	-	-	-	-	-	4.058	-	6.087	559
	-	12	15.027	291.164	2.213.153	238.533	78.615	3.490.895	320.463
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.	Kategori Portofolio *)	Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit						
		0%	20%	25%	35%	40%	50%	
6	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	-	
7	Tagihan Kepada Korporasi	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah Counterparty Credit Risk	-	-	-	-	-	-	

*) Mengacu pada SE OJK No. 24/SEOJK.03/2021 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko Untuk Risiko Kredit Dengan Menggunakan Pendekatan Standar Bagi Bank Umum.

31 Desember 2022

No.	Kategori Portofolio **)	Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit					
		0%	20%	25%	35%	40%	
A	Eksposur Neraca						
1	Tagihan kepada Pemerintah	70.895.488	-	-	-	-	
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	-	112.332	-	-	-	
3	Tagihan kepada - Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	
4	Tagihan kepada Bank	-	1.870.587	-	-	-	
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	22.871.181	52.672.589	166.176.052	-	
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	
7	Kredit Pegawai atau Pensiunan	-	-	-	-	-	
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	326.143	163.150	-	-	-	
9	Tagihan kepada Korporasi	2.785.212	-	-	-	-	
10	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	-	1.017.561	-	-	-	
11	Aset Lainnya	1.661.534	-	-	-	-	
	Jumlah Eksposur Neraca	75.668.376	26.034.811	52.672.589	166.176.052	-	
B	Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pd Transaksi Rekening Administratif						
1	Tagihan kepada Pemerintah	-	-	-	-	-	
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	
3	Tagihan kepada - Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	
4	Tagihan kepada Bank	-	-	-	-	-	
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-	-	
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-	-	-	-	
7	Kredit Pegawai atau Pensiunan	-	-	-	-	-	
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	
9	Tagihan kepada Korporasi	-	-	-	-	-	
10	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	
	Jumlah Eksposur TRA	-	-	-	-	-	
C	Eksposur akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)						
1	Tagihan kepada Pemerintah	1.434.190	-	-	-	-	
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	
3	Tagihan kepada - Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	
4	Tagihan kepada Bank	-	-	-	-	-	
5	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	
6	Tagihan kepada Korporasi	-	-	-	-	-	
	Jumlah Counterparty Credit Risk	1.434.190	-	-	-	-	

**) Mengacu pada SE OJK No. 42/SEOJK.03/2016 tentang Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko Untuk Risiko Kredit Dengan Menggunakan Pendekatan Standar.

[illegible]



**Tabel Tagihan Bersih dan Teknis Mitigasi Risiko Kredit
per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

(dalam jutaan Rupiah)

No.	Kategori Portofolio *)	31 Desember 2023					
		Tagihan Bersih	Bagian yang Dijamin				Bagian yang Tidak Dijamin
			Agunan	Garansi	Asuransi Kredit	Lainnya	
A	Eksposur Aset pada Laporan Posisi Keuangan, kecuali Eksposur Sekuritisasi						
1	Tagihan kepada Pemerintah	84.993.137	-	-	-	-	84.993.137
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	15.695.726	-	-	-	-	15.695.726
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	3.435.227	-	-	-	-	3.435.227
5	Tagihan berupa Covered Bond	-	-	-	-	-	-
6	Tagihan Kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	20.734	-	-	-	-	20.734
7	Tagihan berupa Surat Berharga/Piutang Subordinasi, Ekuitas, dan Instrumen Modal Lainnya	-	-	-	-	-	-
8	Kredit Beragun Rumah Tinggal	268.699.489	-	-	150.857.293	-	117.842.195
9	Kredit Beragun Properti Komersial	5.795.141	67.626	-	-	-	5.727.515
10	Kredit untuk Pengadaan Tanah, Pengelolaan Tanah, dan Konstruksi	15.033.448	-	-	-	-	15.033.448
11	Kredit Pegawai/Pensiunan	2.273.660	-	-	-	-	2.273.660
12	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	6.745.842	234.029	-	233.829	-	6.277.984
13	Tagihan Kepada Korporasi	15.822.590	155.178	-	-	-	15.667.412
14	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	6.819.067	-	-	-	-	6.819.067
15	Aset Lainnya	13.507.510	-	-	-	-	13.507.510
	Jumlah Eksposur Neraca	438.841.570	456.833	-	151.091.122	-	287.293.615
B	Eksposur Kewajiban Komitmen atau Kewajiban Kontinjensi pada TRA, kecuali Eksposur Sekuritisasi						
1	Tagihan Kepada Pemerintah	103.743	-	-	-	-	103.743
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	562.576	-	-	-	-	562.576
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank	-	-	-	-	-	-
5	Tagihan Kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	450	-	-	-	-	450
6	Kredit Beragun Rumah Tinggal	4.776	-	-	-	-	4.776
7	Kredit Beragun Properti Komersial	148.313	-	-	-	-	148.313
8	Kredit untuk Pengadaan Tanah, Pengelolaan Tanah, dan Konstruksi	837.422	-	-	-	-	837.422
9	Kredit Pegawai/Pensiunan	4	-	-	-	-	4
10	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	3.640	-	-	-	-	3.640
11	Tagihan Kepada Korporasi	3.225.368	-	-	-	-	3.225.368
12	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	4.058	-	-	-	-	4.058
	Jumlah Eksposur TRA	4.890.349	-	-	-	-	4.890.349
C	Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)						
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	-
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank	-	-	-	-	-	-

No.	Kategori Portofolio *)	31 Desember 2023					
		Tagihan Bersih	Bagian yang Dijamin				Bagian yang Tidak Dijamin
			Agunan	Garansi	Asuransi Kredit	Lainnya	
5	Tagihan Kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	-	-	-	-	-	-
6	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	-
7	Tagihan Kepada Korporasi	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Counterparty Credit Risk	-	-	-	-	-	-

*) Mengacu pada SE OJK No. 24/SEOJK.03/2021 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko Untuk Risiko Kredit Dengan Menggunakan Pendekatan Standar Bagi Bank Umum.

(dalam jutaan Rupiah)

No.	Kategori Portofolio **)	31 Desember 2022					
		Tagihan Bersih	Bagian yang Dijamin				Bagian yang Tidak Dijamin
			Agunan	Garansi	Asuransi Kredit	Lainnya	
A Eksposur Neraca							
1	Tagihan kepada Pemerintah	70.895.488	-	-	-	-	70.895.488
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	13.690.301	-	-	-	-	13.690.301
3	Tagihan kepada - Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank	1.910.769	-	-	-	-	1.910.769
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	212.892.414	-	-	123.174.569	-	89.717.845
6	Kredit Beragun Properti Komersial	16.961.350	-	-	614.184	-	16.347.165
7	Kredit Pegawai atau Pensiunan	1.682.018	-	-	-	-	1.682.018
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	6.387.580	326.002	-	163.150	-	5.898.428
9	Tagihan kepada Korporasi	13.982.905	2.785.212	-	-	-	11.197.694
10	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	3.423.227	-	-	887.571	-	2.535.656
11	Aset Lainnya	10.408.685	-	-	-	-	10.408.685
	Jumlah Eksposur Neraca	352.234.736	3.111.213	-	124.839.474	-	224.284.048
B Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pada Transaksi Rekening Administratif							
1	Tagihan kepada Pemerintah	-	-	-	-	-	-
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	-
3	Tagihan kepada - Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank	-	-	-	-	-	-
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-	-	-
6	Kredit Beragun Properti Komersial	17.956	-	-	-	-	17.956
7	Kredit Pegawai atau Pensiunan	-	-	-	-	-	-
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	3.615	-	-	-	-	3.615
9	Tagihan kepada Korporasi	1.086.430	-	-	-	-	1.086.430
10	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Eksposur TRA	1.108.001	-	-	-	-	1.108.001
C Eksposur akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)							
1	Tagihan kepada Pemerintah	1.434.190	-	-	-	-	1.434.190
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-	-	-	-
3	Tagihan kepada - Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-



No.	Kategori Portofolio **)	31 Desember 2022					
		Tagihan Bersih	Bagian yang Dijamin				Bagian yang Tidak Dijamin
			Agunan	Garansi	Asuransi Kredit	Lainnya	
4	Tagihan kepada Bank	-	-	-	-	-	-
5	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	-	-	-	-	-	-
6	Tagihan kepada Korporasi	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Counterparty Credit Risk	1.434.190	-	-	-	-	1.434.190

**) Mengacu pada SE OJK No. 42/SEOJK.03/2016 tentang Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko Untuk Risiko Kredit Dengan Menggunakan Pendekatan Standar.

Tabel Sekuritisasi Aset, Peringkat dan Lembaga Pemeringkat

No.	Transaksi Sekuritisasi	Nominal Total (Rp)	Unit KPR	Kelas	Avg Tenor EBA (yr)	
1	KIK-EBA DBTN 05	Rp1.500.000.001.615	33.173	A1	2,00	
				A2	5,00	
				B		
2	EBA-SP SMF-BTN 02	Rp1.000.000.000.000	11.280	A1	2,00	
				A2	5,00	
				B		
3	EBA-SP SMF-BTN 03	Rp1.000.000.000.000	11.237	A1	2,00	
				A2	4,00	
				B		
4	EBA-SP SMF-BTN 04	Rp2.000.000.000.000	18.728	A1	2,00	
				A2	5,00	
				B		
5	EBA-SP SMF-BTN 05	Rp2.000.000.000.000	16.476	A1	3,00	
				A2	5,00	
				M	8,00	
				B		
6	EBA-SP SMF-BTN 06	Rp631.000.543.015	7.721	A	3,00	
				B		
7	EBA-SP SMF-BTN 07	Rp500.000.001.416	6.188	A	3,00	
				B		
8	EBA-SP SMF-BTN08	Rp600.000.020.055	4.340	A	4,00	
				B		
TOTAL		Rp9.231.000.566.101	109.143			

Risiko Kredit: Sekuritisasi Aset

Tujuan Perseroan melakukan sekuritisasi adalah mentransformasi aset yang tidak likuid menjadi aset yang likuid dalam bentuk surat berharga/securities yang dapat diperjualbelikan (disebut dengan *Asset Backed Securities* - ABS atau Efek Beragun Aset - EBA). Sekuritisasi Aset KPR dilakukan Perseroan antara lain sebagai upaya untuk mitigasi *maturity mismatch*, alternatif sumber pendanaan KPR, dan peningkatan *lending capacity*. Fungsi yang dijalankan oleh Perseroan dalam transaksi sekuritisasi meliputi *originator*, *servicer*, dan *investor*. Dalam rangka sekuritisasi atas tagihan kredit kepemilikan rumah (kumpulan tagihan), Perseroan telah melakukan penjualan atas kumpulan tagihan kepada pihak ketiga (sekuritisasi KPR).

Atas sekuritisasi KPR (efek beragun aset), Perseroan mengakuinya sebagai penjualan atas tagihan KPR tersebut dikarenakan Perseroan telah memindahkan risiko dan manfaat atas kepemilikannya kepada pihak ketiga. Oleh Karena itu, pada tanggal efektif sekuritisasi Perseroan menghentikan pengakuan atas kumpulan tagihan tersebut. Uraian terkait perhitungan ATMR Risiko Kredit dengan menggunakan pendekatan standar adalah sebagai berikut:

	Nominal Class (Rp)	Tanggal Transaksi	Jatuh Tempo	Average Life	Kupon Kelas A	Peringkat Pefindo
	Rp723.500.000.000	28 November 2014	7 September 2025	6,72	A1 = 10%	idAAA
	Rp647.500.000.000				A2 = 10.25%	
	Rp129.000.001.615					
	Rp400.000.000.000	31 Oktober 2016	7 Juni 2027	7,05	A1 = 8.15%	idAAA
	Rp513.000.000.000				A1 = 8.75%	
	Rp87.000.000.000					
	Rp200.000.000.000	28 April 2017	7 Juli 2029	7,78	A1 = 8,00%	idAAA
	Rp713.000.000.000				A2 = 8,40%	
	Rp87.000.000.000					
	Rp700.000.000.000	28 Februari 2018	7 Mei 2029	7,03	A1 = 7,00%	idAAA
	Rp1.124.000.000.000				A2 = 7,50%	
	Rp176.000.000.000					
	Rp574.000.000.000	27 November 2019	7 Mei 2032	9,09	A1 = 8,50%	idAAA
	Rp1.142.000.000.000				A2 = 8,75%	
	Rp24.000.000.000				M = 10,40%	idA
	Rp260.000.000.000					
	Rp576.734.000.000	30 Desember 2020	7 Juli 2032	6,08	6,50%	idAAA
	Rp54.266.543.015					
	Rp452.500.000.000	23 Desember 2022	7 Januari 2034	5,66	7,70%	idAAA
	Rp47.500.001.416					
	Rp544.800.000.000	26 September 2023	7 Agustus 2035	7,44	6,65%	idAAA
	Rp55.200.020.055					
	Rp9.231.000.566.101					



Tabel Transaksi Sekuritisasi

No.	Eksposur Sekuritisasi	31 Desember 2023			
		Nilai aset yang disekuritisasi	Nilai aset yang disekuritisasi yang mengalami penurunan nilai		Laba/Rugi dari aktivitas sekuritisasi
			Telah Jatuh Tempo	Belum Jatuh Tempo	
1	Bank bertindak sebagai Kreditur Asal	-	-	-	-
	Tagihan Beragun Rumah Tinggal	13.386.868	-	-	-
2	Bank bertindak sebagai Penyedia Kredit Pendukung	-	-	-	-
	a. Fasilitas penanggung risiko pertama	-	-	-	-
	b. Fasilitas penanggung risiko kedua	-	-	-	-
3	Bank bertindak sebagai Penyedia Fasilitas Likuiditas	-	-	-	-
4	Bank bertindak sebagai Penyedia Jasa	13.386.868	-	-	-
5	Bank bertindak sebagai Bank Kostudian	-	-	-	-
6	Bank bertindak sebagai Pemodal	-	-	-	-
	a. <i>Senior tranche</i>	-	-	-	-
	Tagihan Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-
	b. <i>Junior tranche</i>	-	-	-	-
	Tagihan Beragun Rumah Tinggal	-	-	-	-

Tabel Ringkasan Aktivitas Sekuritisasi - Perseroan Bertindak sebagai Kreditur Asal per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

(dalam jutaan Rupiah)

No.	Underlying Asset *)	31 Desember 2023	
		Nilai Aset yang Disekuritisasi	Keuntungan (Kerugian) Penjualan
1	Tagihan kepada Pemerintah	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	-	-
5	Tagihan berupa <i>Covered Bond</i>	-	-
6	Tagihan Kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	-	-
7	Tagihan berupa Surat Berharga/Piutang Subordinasi, Ekuitas, dan Instrumen Modal Lainnya	-	-
8	Kredit Beragun Rumah Tinggal	13.386.868	-
9	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-
10	Kredit untuk Pengadaan Tanah, Pengelolaan Tanah, dan Konstruksi	-	-
11	Kredit Pegawai/Pensiunan	-	-
12	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-
13	Tagihan Kepada Korporasi	-	-
14	Aset Lainnya	-	-
	Jumlah	13.386.868	-

*) Mengacu pada SE OJK No. 24/SEOJK.03/2021 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko Untuk Risiko Kredit Dengan Menggunakan Pendekatan Standar Bagi Bank Umum.

(dalam jutaan Rupiah)

31 Desember 2023		31 Desember 2022					
ATMR	Pengurang Modal	Nilai aset yang disekuritisasi	Nilai aset yang disekuritisasi yang mengalami penurunan nilai		Laba/Rugi dari aktivitas sekuritisasi	ATMR	Pengurang Modal
			Telah Jatuh Tempo	Belum Jatuh Tempo			
-	-	-	-	-	-	-	-
226.678	-	12.286.868	-	-	-	211.180	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	12.286.868	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

(dalam jutaan Rupiah)

No.	Underlying Asset **)	31 Desember 2022	
		Nilai Aset yang Disekuritisasi	Keuntungan (Kerugian) Penjualan
1	Tagihan kepada Pemerintah	-	-
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	-	-
3	Tagihan kepada - Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-
4	Tagihan kepada Bank	-	-
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	12.286.868	-
6	Kredit Beragun Properti Komersial	-	-
7	Kredit Pegawai atau Pensiunan	-	-
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	-	-
9	Tagihan kepada Korporasi	-	-
10	Aset Lainnya	-	-
	Jumlah	12.286.868	-

**) Mengacu pada SE OJK No. 42/SEOJK.03/2016 tentang Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko Untuk Risiko Kredit Dengan Menggunakan Pendekatan Standar.



Tabel Eksposur Aset di Neraca

(dalam jutaan Rupiah)

No.	Kategori Portofolio *)	31 Desember 2023		
		Tagihan Bersih	ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
1	Tagihan kepada Pemerintah	84.993.137	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	15.695.726	6.014.430	5.573.249
3	Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-
4	Tagihan Kepada Bank	3.435.227	833.519	833.519
5	Tagihan berupa <i>Covered Bond</i>	-	-	-
6	Tagihan Kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	20.734	8.294	8.294
7	Tagihan berupa Surat Berharga/Piutang Subordinasi, Ekuitas, dan Instrumen Modal Lainnya	-	-	-
8	Kredit Beragun Rumah Tinggal	268.699.489	94.516.914	70.123.127
9	Kredit Beragun Properti Komersial	5.795.141	4.911.469	4.853.986
10	Kredit untuk Pengadaan Tanah, Pengelolaan Tanah, dan Konstruksi	15.033.448	15.894.777	15.879.575
11	Kredit Pegawai/Pensiunan	2.273.660	1.136.830	1.136.830
12	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	6.745.842	4.801.554	4.567.635
13	Tagihan Kepada Korporasi	15.822.590	11.295.896	10.209.652
14	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	6.819.067	8.325.489	8.325.489
15	Aset Lainnya	13.507.510	11.418.815	11.418.815
	Jumlah	438.841.570	159.157.985	132.930.171

*) Mengacu pada SE OJK No. 24/SEOJK.03/2021 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko Untuk Risiko Kredit Dengan Menggunakan Pendekatan Standar Bagi Bank Umum.

(dalam jutaan Rupiah)

No.	Kategori Portofolio **)	31 Desember 2022		
		Tagihan Bersih	ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
1	Tagihan kepada Pemerintah	70.895.488	-	-
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	13.690.301	6.811.451	6.811.451
3	Tagihan kepada - Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank	1.910.769	394.208	394.208
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	241.719.822	75.904.002	58.420.939
6	Kredit Beragun Properti Komersial	17.850.675	17.850.675	17.236.491
7	Kredit Pegawai atau Pensiunan	1.682.018	841.009	841.009
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	7.304.129	5.478.097	5.143.757
9	Tagihan kepada Korporasi	14.024.660	14.024.660	11.239.448
10	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	3.664.982	4.747.246	3.931.967
11	Aset Lainnya	10.408.685	-	8.785.946
	Jumlah	383.151.528	126.051.347	112.805.216

**) Mengacu pada SE OJK No. 42/SEOJK.03/2016 tentang Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko Untuk Risiko Kredit Dengan Menggunakan Pendekatan Standar.

Tabel Eksposur Kewajiban Komitmen atau Kewajiban Kontinjensi pada TRA, kecuali Eksposur Sekuritisasi

(dalam jutaan Rupiah)

No.	Kategori Portofolio *)	31 Desember 2023		
		Tagihan Bersih	ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
1	Tagihan Kepada Pemerintah	103.743	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	562.576	216.301	216.301
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank	-	-	-
5	Tagihan Kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	450	180	180
6	Kredit Beragun Rumah Tinggal	4.776	1.684	1.260
7	Kredit Beragun Properti Komersial	148.313	125.864	124.384
8	Kredit untuk Pengadaan Tanah, Pengelolaan Tanah, dan Konstruksi	837.422	886.632	885.788
9	Kredit Pegawai/Pensiunan	4	2	2
10	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	3.640	2.571	2.443
11	Tagihan Kepada Korporasi	3.225.368	2.286.629	2.254.449
12	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	4.058	6.087	6.087
	Jumlah	4.890.349	3.525.951	3.490.895

*) Mengacu pada SE OJK No. 24/SEOJK.03/2021 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko Untuk Risiko Kredit Dengan Menggunakan Pendekatan Standar Bagi Bank Umum.

(dalam jutaan Rupiah)

No.	Kategori Portofolio **)	31 Desember 2022		
		Tagihan Bersih	ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
1	Tagihan kepada Pemerintah	-	-	-
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-
3	Tagihan kepada - Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank	-	-	-
5	Kredit Beragun Rumah Tinggal	-	-	-
6	Kredit Beragun Properti Komersial	17.956	17.956	17.956
7	Kredit Pegawai atau Pensiunan	-	-	-
8	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	3.615	2.711	2.711
9	Tagihan kepada Korporasi	1.086.430	1.086.430	1.086.430
10	Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo	-	-	-
	Jumlah	1.108.001	1.107.098	1.107.098

**) Mengacu pada SE OJK No. 42/SEOJK.03/2016 tentang Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko Untuk Risiko Kredit Dengan Menggunakan Pendekatan Standar.

**Tabel Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit akibat Kegagalan Pihak Lawan
(Counterparty Credit Risk)**

(dalam jutaan Rupiah)

No.	Kategori Portofolio *)	31 Desember 2023		
		Tagihan Bersih	ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
1	Tagihan Kepada Pemerintah	-	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank	-	-	-
5	Tagihan Kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	-	-	-
6	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel			
7	Tagihan Kepada Korporasi	-	-	-
	Jumlah	-	-	-

*) Mengacu pada SE OJK No. 24/SEOJK.03/2021 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko Untuk Risiko Kredit Dengan Menggunakan Pendekatan Standar Bagi Bank Umum.

(dalam jutaan Rupiah)

No.	Kategori Portofolio **)	31 Desember 2022		
		Tagihan Bersih	ATMR sebelum MRK	ATMR setelah MRK
1	Tagihan kepada Pemerintah	1.434.190	-	-
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	-	-	-
3	Tagihan kepada - Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank	-	-	-
5	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	-	-	-
6	Tagihan kepada Korporasi	-	-	-
	Jumlah	1.434.190	-	-

**) Mengacu pada SE OJK No. 42/SEOJK.03/2016 tentang Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko Untuk Risiko Kredit Dengan Menggunakan Pendekatan Standar.

Tabel Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit Akibat Kegagalan Penyelesaian (Settlement Risk)

(dalam jutaan Rupiah)

No.	Kategori Portofolio *)	31 Desember 2023		
		Nilai Eksposur	Faktor Pengurang Modal	ATMR setelah MRK
1	Untuk transaksi yang tergolong <i>Delivery versus payment</i> (DvP)	-	-	-
	a. Beban Modal 8% (5-15 hari)	-	-	-
	b. Beban Modal 50% (16-30 hari)	-	-	-
	c. Beban Modal 75% (31-45 hari)	-	-	-
	d. Beban Modal 100% (lebih dari 45 hari)	-	-	-
2	Untuk transaksi yang tergolong <i>Non-delivery versus payment</i> (Non DvP)	-	-	-
	Jumlah	-	-	-

*) Mengacu pada SE OJK No. 24/SEOJK.03/2021 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko Untuk Risiko Kredit Dengan Menggunakan Pendekatan Standar Bagi Bank Umum.

(dalam jutaan Rupiah)

No.	Kategori Portofolio **)	31 Desember 2022		
		Nilai Eksposur	Faktor Pengurang Modal	ATMR setelah MRK
1	<i>Delivery versus payment</i>	-	-	-
	a. Beban Modal 8% (5-15 hari)	-	-	-
	b. Beban Modal 50% (16-30 hari)	-	-	-
	c. Beban Modal 75% (31-45 hari)	-	-	-
	d. Beban Modal 100% (lebih dari 45 hari)	-	-	-
2	<i>Non-Delivery versus payment</i>	-	-	-
	Jumlah	-	-	-

***) Mengacu pada SE OJK No. 42/SEOJK.03/2016 tentang Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko Untuk Risiko Kredit Dengan Menggunakan Pendekatan Standar.

Tabel Eksposur Sekuritisasi

(dalam jutaan Rupiah)

No.	Jenis Transaksi *)	31 Desember 2023	
		Faktor Pengurang Modal	ATMR
1	ATMR atas Eksposur Sekuritisasi yang dihitung dengan Metode External Rating Based Approach (ERBA)	-	-
2	ATMR atas Eksposur Sekuritisasi yang dihitung dengan Metode Standardized Approach (SA)	-	226.678
3	Eksposur Sekuritisasi yang merupakan Faktor Pengurang Modal Inti Utama	-	-
	Jumlah	-	226.678

*) Mengacu pada SE OJK No. 24/SEOJK.03/2021 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko Untuk Risiko Kredit Dengan Menggunakan Pendekatan Standar Bagi Bank Umum.

(dalam jutaan Rupiah)

No.	Jenis Transaksi **)	31 Desember 2022	
		Faktor Pengurang Modal	ATMR
1	ATMR atas Eksposur Sekuritisasi yang dihitung dengan Metode External Rating Based Approach (ERBA)	-	-
2	ATMR atas Eksposur Sekuritisasi yang dihitung dengan Metode Standardized Approach (SA)	-	211.180
3	Eksposur Sekuritisasi yang merupakan Faktor Pengurang Modal Inti Utama	-	-
	Jumlah	-	211.180

***) Mengacu pada SE OJK No. 42/SEOJK.03/2016 tentang Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko Untuk Risiko Kredit Dengan Menggunakan Pendekatan Standar.

Tabel Eksposur Kredit Derivatif

(dalam jutaan Rupiah)

No.	Jenis Transaksi *)	31 Desember 2023	
		Tagihan Bersih	ATMR
1	Tagihan kepada Pemerintah	-	-
	a. Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia	-	-
	b. Tagihan Kepada Pemerintah Negara Lain	-	-
2	Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik	-	-
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-



No.	Jenis Transaksi *)	31 Desember 2023	
		Tagihan Bersih	ATMR
4	Tagihan kepada Bank	150.239	44.017
	a. Tagihan Jangka Pendek	-	-
	b. Tagihan Jangka Panjang	150.239	44.017
5	Tagihan Kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	-	-
	a. Tagihan Jangka Pendek	-	-
	b. Tagihan Jangka Panjang	-	-
6	Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	-	-
7	Tagihan Kepada Korporasi	-	-
8	Eksposur terkait <i>Central Counterparty</i> (CCP)	-	-
	Jumlah	150.239	44.017

*) Mengacu pada SE OJK No. 24/SEOJK.03/2021 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko Untuk Risiko Kredit Dengan Menggunakan Pendekatan Standar Bagi Bank Umum yang berlaku terhitung tanggal 1 Januari 2023

(dalam jutaan Rupiah)

No.	Jenis Transaksi **)	31 Desember 2022	
		Faktor Pengurang Modal	ATMR
1	Tagihan kepada Pemerintah	-	-
	a. Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia	-	-
	b. Tagihan Kepada Pemerintah Negara Lain	-	-
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	-	-
3	Tagihan kepada - Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-
4	Tagihan kepada Bank	-	-
	a. Tagihan Jangka Pendek	-	-
	b. Tagihan Jangka Panjang	-	-
5	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel	-	-
6	Tagihan kepada Korporasi	-	-
7	Eksposur tertimbang dari <i>Credit Valuation Adjustment</i> (CVA risk weighted assets)	-	194.864
	Jumlah	-	194.864

**) Mengacu pada SE OJK No. 42/SEOJK.03/2016 tentang Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko Untuk Risiko Kredit Dengan Menggunakan Pendekatan Standar.

Tabel Pengukuran Risiko Kredit per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

(dalam jutaan Rupiah)

No.	Keterangan		31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	PERHITUNGAN ATMR RISIKO KREDIT	(A)	136.691.761	114.318.357
2	"FAKTOR PENGURANG ATMR RISIKO KREDIT: Selisih lebih cadangan umum PPKA atas aset produktif yang wajib dihitung dengan 1,25% ATMR untuk Risiko Kredit"	(B)	-	-
3	TOTAL ATMR RISIKO KREDIT (A) - (B)	(C)	136.691.761	114.318.357
4	TOTAL FAKTOR PENGURANG MODAL	(D)	-	-

Risiko Pasar

Risiko pasar merupakan risiko pada laporan posisi keuangan dan rekening administratif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar. Dalam melakukan pengukuran risiko pasar, Perseroan menggunakan perhitungan *standard method* yang digunakan untuk menghitung Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) untuk Risiko Pasar. Risiko nilai tukar yang timbul dari fluktuasi nilai tukar dikelola dengan cara menjaga posisi devisa neto sesuai dengan peraturan Bank Indonesia.

Gejolak eksternal juga diakomodasi dengan dilakukan *stress testing* untuk melihat sejauh mana Perseroan dapat bertahan dengan beberapa skenario perubahan kondisi eksternal, khususnya perubahan suku bunga pasar.

Seluruh transaksi valas yang dilakukan oleh Perseroan adalah transaksi *spot*. Saat ini Perseroan belum melakukan transaksi valas yang bersifat derivatif. Dalam perhitungan KPM, Perseroan menggunakan metode standar sebagaimana diatur dalam SE OJK No.23/SEOJK.03/2022 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Pasar bagi Bank Umum Pasal V. Ketentuan Peralihan maka Perseroan tetap menggunakan metode standar sebagaimana diatur dalam SE OJK No.38/SEOJK.03/2016 tanggal 8 September 2016 tentang Pedoman Penggunaan Metode Standar Dalam Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Dengan Memperhitungkan Risiko Pasar.

Tabel Risiko Pasar Menggunakan Metode Standar per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

(dalam jutaan Rupiah)

No.	Jenis Risiko	31 Desember 2023		31 Desember 2022	
		Beban Modal	ATMR	Beban Modal	ATMR
1	Risiko Suku Bunga	32.088	401.103	76.147	951.841
	a. Risiko Spesifik		-	754	9.419
	b. Risiko Umum		401.103	75.394	942.422
2	Risiko Nilai Tukar	43.298	541.223	33.717	421.458
3	Risiko Ekuitas	-	-	-	-
4	Risiko Komoditas	-	-	-	-
5	Risiko Option	-	-	-	-
	Jumlah	75.386	942.326	109.864	1.373.299

Eksposur Interest Rate In The Banking Book (IRRBB)

Interest Rate in The Banking Book (IRRBB) merupakan bagian dari risiko suku bunga dengan fokus pada dampak perubahan nilai ekonomis dari posisi *banking book* yang berpotensi memberikan dampak terhadap permodalan dan rentabilitas Perseroan. Dalam pengukuran dan perhitungan IRRBB, Perseroan menerapkan 6 (enam) jenis skenario *shock* suku bunga untuk perhitungan Δ EVE yaitu *parallel up*, *parallel down*, *steepener*, *flattener*, *short rates up*,

dan *short rates down*. Sedangkan untuk perhitungan Δ NII menggunakan 2 (dua) skenario *shock* yaitu *parallel up* dan *parallel down*. Perseroan mengukur perubahan NII (Δ NII) sebagai penurunan maksimum dari NII saat terjadi skenario peningkatan atau penurunan suku bunga. Berikut hasil pemantauan manajemen risiko suku bunga Perseroan. Berikut hasil pemantauan manajemen risiko suku bunga Perseroan.

Tabel Risiko Pasar Menggunakan Metode Standar per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

(dalam jutaan Rupiah)

No.	Jenis Skenario Shock Suku Bunga	31 Desember 2022				31 Desember 2021			
		Δ EVE		Δ NII		Δ EVE		Δ NII	
		T	T-1	T	T-1	T	T-1	T	T-1
1	<i>Parallel up</i>	(287.473)	(334.889)	(1.815.275)	(2.278.750)	(172.121)	50.400	(2.405.885)	(2.429.886)
2	<i>Parallel down</i>	1.042.596	873.611	1.490.950	1.936.701	949.773	660.477	1.974.177	1.959.842
3	<i>Steepener</i>	(913.832)	(478.467)			(1.017.121)	(1.102.635)		

No.	Jenis Skenario <i>Shock</i> Suku Bunga	31 Desember 2022				31 Desember 2021			
		Δ EVE		Δ NII		Δ EVE		Δ NII	
		T	T-1	T	T-1	T	T-1	T	T-1
4	<i>Flattener</i>	1.033.934	567.552			1.184.300	1.310.859		
5	<i>Short rate up</i>	338.291	(10.872)			444.729	639.907		
6	<i>Short rate down</i>	(836.789)	(494.399)			(1.110.090)	(1.362.249)		
7	Nilai Maksimum Negatif (absolut)	913.832	494.399	1.815.275	2.278.750	1.110.090	1.362.249	2.405.885	2.429.886
8	Modal <i>Tier 1</i> (untuk Δ EVE) atau <i>Project Income</i> (untuk Δ NII)	27.115.896	26.246.324	16.319.417	16.319.417	22.563.440	19.346.098	13.701.657	13.701.657
	Nilai Maksimum dibagi Modal <i>Tier 1</i> (untuk Δ EVE) atau <i>Project Income</i> (untuk Δ NII)	3,37%	1,88%	11,12%	13,96%	4,92%	7,04%	17,56%	17,73%

Berdasarkan portofolio Perseroan saat ini, apabila terjadi perubahan suku bunga sesuai dengan skenario *parallel shock up* sebesar $\pm$ 400 bps akan berdampak terhadap perubahan pendapatan bunga dan beban bunga Perseroan sebesar 11,12% terhadap target NII Perseroan. Adapun potensi kerugian maksimum nilai ekonomis dari ekuitas yang dialami Perseroan apabila terjadi perubahan suku bunga jangka pendek menurun

dan suku bunga jangka panjang meningkat sesuai dengan skenario *steepener* maka potensi kerugian maksimum terhadap Ekuitas Modal Inti (*Tier 1*) yang akan dialami Perseroan sebesar Rp913 miliar dan bila dibanding dengan total Modal Inti (*Tier 1*) sebesar 3,37% sehingga masih berada dibawah ketentuan limit OJK sebesar 15% dari modal inti (*Tier 1*).

Tabel Profil Maturitas Rupiah

No	Pos-pos	31 Desember 2023						
		Saldo	Jatuh Tempo					
			s.d 1 minggu	> 1 minggu s.d 2 minggu	> 2 minggu s.d 1 bulan	> 1 bulan s.d 3 bulan	> 3 bulan s.d 6 bulan	> 6 bulan s.d 12 bulan
I. Neraca								
A. Aset								
1	Kas	2.095.378	2.095.378	-	-	-	-	-
2	Penempatan pada Bank Indonesia	29.950.536	29.756.476	-	-	-	194.060	-
	a. Giro	17.607.788	17.607.788	-	-	-	-	-
	b. SBI	194.060	-	-	-	-	194.060	-
	c. Lainnya	12.148.688	12.148.688	-	0	-	-	-
3	Penempatan pada bank lain	234.107	234.107	-	-	-	-	-
4	Surat Berharga	35.902.399	576.504	270	7.483.702	2.955.254	882.854	1.260.459
	a. SUN	31.398.530	573.350	-	7.477.808	2.954.236	562.846	1.210.716
	1) diperdagangkan	3.769.410	573.350	-	-	2.168.375	-	15.618
	2) tersedia untuk di jual	8.531.019	-	-	-	30.000	111.036	521.271
	3) dimiliki hingga jatuh tempo	19.098.101	-	-	7.477.808	755.861	451.810	673.827

Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Perseroan.

Risiko operasional dapat bersumber antara lain dari SDM, proses internal, sistem dan infrastruktur serta kejadian eksternal. Sumber - sumber risiko tersebut dapat menyebabkan kejadian - kejadian yang berdampak negatif pada operasional Perseroan sehingga kemunculan dari jenis - jenis kejadian risiko operasional merupakan salah satu ukuran keberhasilan atau kegagalan manajemen risiko untuk risiko operasional.

Adapun jenis - jenis kejadian risiko operasional dapat digolongkan menjadi beberapa tipe kejadian seperti *fraud* internal, *fraud* eksternal, praktik ketenagakerjaan dan keselamatan lingkungan kerja, nasabah, produk dan praktek bisnis, kerusakan aset fisik, gangguan aktivitas bisnis dan kegagalan sistem, serta kesalahan proses dan eksekusi, termasuk *fraud* yang timbul akibat aktivitas pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Sesuai SEOJK No. 06/SEOJK.03/2020 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Operasional Dengan Menggunakan Pendekatan Standar Bagi Bank Umum, Bank BTN telah melakukan perhitungan ATMR operasional dengan pendekatan standar mulai tahun 2023.

Uraian terkait risiko operasional dijabarkan sebagai berikut:

Tabel Risiko Operasional per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

(dalam jutaan Rupiah)

Pendekatan yang Digunakan	31 Desember 2023			31 Desember 2022		
	KIB	MMRO	ATMR	Pendapatan Bruto (Rata-rata 3 Tahun Terakhir)	Beban Modal	ATMR
Pendekatan Indikator Dasar	1.436.485	1.436.485	17.956.060	12.767.391	1.915.109	23.938.858

(dalam jutaan Rupiah)

		31 Desember 2022						
		Saldo	Jatuh Tempo					
			s.d 1 minggu	> 1 minggu s.d 2 minggu	> 2 minggu s.d 1 bulan	> 1 bulan s.d 3 bulan	> 3 bulan s.d 6 bulan	> 6 bulan s.d 12 bulan
> 12 bulan								
-	1.645.839	1.645.839	-	-	-	-	-	-
-	37.769.892	37.769.892	-	-	-	-	-	-
-	25.193.997	25.193.997	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	12.575.895	12.575.895	-	0	-	-	-	-
-	940.113	940.113	-	-	-	-	-	-
22.743.357	48.846.898	2.076.651	649.576	5.199.834	10.707.951	5.820.621	3.053.337	21.338.928
18.619.574	47.420.225	2.061.104	649.576	4.893.523	10.705.307	5.818.547	2.869.890	20.422.278
1.012.066	19.591.199	2.061.104	649.576	-	9.230.307	4.938.578	2.077.981	633.654
7.868.712	10.501.391	-	-	-	-	479.969	387.909	9.633.512
9.738.795	17.327.635	-	-	4.893.523	1.475.000	400.000	404.000	10.155.112

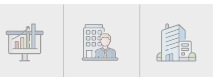


No	Pos-pos	31 Desember 2023						
		Saldo	Jatuh Tempo					
			s.d 1 minggu	> 1 minggu s.d 2 minggu	> 2 minggu s.d 1 bulan	> 1 bulan s.d 3 bulan	> 3 bulan s.d 6 bulan	> 6 bulan s.d 12 bulan
	4) pinjaman yang diberikan pada piutang	-	-	-	-	-	-	-
	b. Surat Berharga Korporasi	4.503.869	3.153	270	5.894	1.018	320.009	49.742
	1) diperdagangkan	540.443	-	-	-	-	-	-
	2) tersedia untuk dijual	1.627.903	-	-	-	-	30.000	-
	3) dimiliki hingga jatuh tempo	2.335.524	3.153	270	5.894	1.018	290.009	49.742
	4) pinjaman yang diberikan dan piutang	-	-	-	-	-	-	-
	c. Lainnya	-	-	-	-	-	-	-
5	Kredit yang diberikan	331.237.860	2.096.216	34.163	862.025	1.851.281	2.099.232	6.446.104
	a. Belum Jatuh Tempo	328.453.825	1.225.977	34.163	862.025	1.746.409	2.002.306	6.177.307
	b. Sudah Jatuh Tempo	2.784.034	870.239	-	-	104.872	96.926	268.797
6	Tagihan lainnya	1.195.547	-	-	-	-	1.195.547	-
	a. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (Reverse Repo)	-	-	-	-	-	-	-
	b. Lainnya	1.195.547	-	-	-	-	1.195.547	-
7	Penyertaan Saham	-	-	-	-	-	-	-
8	Lain-lain	17.884.999	-	-	17.884.999	-	-	-
	Jumlah Aset	418.500.826	34.758.681	34.432	26.230.726	4.806.535	4.371.694	7.706.562

B. Kewajiban

1	Dana Pihak Ketiga	324.517.875	110.904.849	15.416.183	56.972.191	38.901.144	15.594.567	22.279.017
	a. Giro	124.350.812	60.031.106	-	-	-	-	-
	b. Tabungan	38.804.771	38.804.771	-	-	-	-	-
	c. Simpanan Berjangka	161.362.291	12.068.971	15.416.183	56.972.191	38.901.144	15.594.567	22.279.017
	1) Deposit on call	5.377.306	2.699.341	1.753.015	924.950	-	-	-
	2) Deposito Berjangka	155.714.985	9.369.631	13.663.168	56.047.241	38.901.144	15.484.567	22.119.017
	3) Lainnya	270.000	-	-	-	-	110.000	160.000
2	Kewajiban pada Bank Indonesia	-	-	-	-	-	-	-
3	Kewajiban pada bank lain	1.300.316	-	-	20.936	2.300	500.000	777.080
4	Surat Berharga yang Diterbitkan	6.834.647	265.846	-	-	-	1.219.500	853.000
	a. Obligasi	6.834.647	265.846	-	-	-	1.219.500	853.000
	b. Subordinasi	-	-	-	-	-	-	-
	c. Lainnya	-	-	-	-	-	-	-
5	Pinjaman yang Diterima	37.523.489	-	-	3.242.020	-	5.140.000	7.455.000
	a. Pinjaman Subordinasi	4.499.997	-	-	-	-	-	-
	b. Lainnya	33.023.492	-	-	3.242.020	-	5.140.000	7.455.000
6	Kewajiban lainnya	1.195.547	1.195.547	-	-	-	-	-
	a. Kewajiban atas surat berharga yang di jual dengan janji dibeli kembali (Repo)	-	-	-	-	-	-	-

		31 Desember 2022						
		Saldo	Jatuh Tempo					
	> 12 bulan		s.d 1 minggu	> 1 minggu s.d 2 minggu	> 2 minggu s.d 1 bulan	> 1 bulan s.d 3 bulan	> 3 bulan s.d 6 bulan	> 6 bulan s.d 12 bulan
-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.123.783	1.426.673	15.547	-	306.311	2.645	2.074	183.447	916.650
540.443	793.831	15.547	-	300.000	-	-	-	478.284
1.597.903	358.798	-	-	-	-	-	103.447	255.351
1.985.438	274.044	-	-	6.311	2.645	2.074	80.000	183.014
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
317.848.839	297.112.950	518.823	220.263	1.851.732	1.964.883	3.176.293	6.913.958	282.466.998
316.405.639	294.073.082	199.615	220.263	1.851.732	1.779.526	3.011.912	5.865.243	281.144.791
1.443.200	3.039.868	319.208	-	-	185.357	164.381	1.048.715	1.322.207
-	1.864.846	1.434.190	-	-	-	430.656	-	-
-	1.434.190	1.434.190	-	-	-	-	-	-
-	430.656	-	-	-	-	430.656	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	15.615.495	-	-	15.615.495	-	-	-	-
340.592.196	403.796.033	44.385.508	869.838	22.667.061	12.672.834	9.427.570	9.967.295	303.805.926
64.449.924	318.997.390	117.850.608	21.122.406	50.806.883	40.988.821	24.461.778	9.268.938	54.497.958
64.319.706	111.715.040	68.853.890	-	-	-	-	-	42.861.151
-	37.273.401	37.273.401	-	-	-	-	-	-
130.218	170.008.949	11.723.317	21.122.406	50.806.883	40.988.821	24.461.778	9.268.938	11.636.807
-	1.085.246	543.905	157.000	384.341	-	-	-	-
130.218	168.923.703	11.179.412	20.965.406	50.422.542	40.988.821	24.461.778	9.268.938	11.636.807
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	180.166	140.138	-	37.728	2.300	-	-	-
4.496.302	8.652.260	-	-	-	2.000.000	-	727.000	5.925.260
4.496.302	8.652.260	-	-	-	2.000.000	-	727.000	5.925.260
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.686.469	28.513.220	-	-	2.017.953	-	-	2.500.000	23.995.267
4.499.997	4.499.977	-	-	-	-	-	-	4.499.977
17.186.472	24.013.242	-	-	2.017.953	-	-	2.500.000	19.495.289
-	430.656	430.656	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-



No	Pos-pos	31 Desember 2023							
		Saldo	Jatuh Tempo						
			s.d 1 minggu	> 1 minggu s.d 2 minggu	> 2 minggu s.d 1 bulan	> 1 bulan s.d 3 bulan	> 3 bulan s.d 6 bulan	> 6 bulan s.d 12 bulan	
	b. Lainnya	1.195.547	1.195.547	-	-	-	-	-	
7	Lain-lain	7.882.807	-	-	7.882.807	-	-	-	
	Jumlah Kewajiban	379.254.681	112.366.242	15.416.183	68.117.954	38.903.444	22.454.067	31.364.097	
	Selisih Aset dengan Kewajiban dalam Neraca	39.246.145	(77.607.561)	(15.381.751)	(41.887.228)	(34.096.909)	(18.082.373)	(23.657.534)	

II. Rekening Administratif

A. Tagihan Rekening Administratif

1	Komitmen	-	-	-	-	-	-	-	
	a. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	-	-	-	-	-	-	-	
	b. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	-	-	-	-	-	-	-	
	1) Spot	-	-	-	-	-	-	-	
	2) Derivatif	-	-	-	-	-	-	-	
	c. Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	
2	Kontijensi	24.998.985	-	-	24.998.985	-	-	-	
	Jumlah Tagihan Rekening Administratif	24.998.985	-	-	24.998.985	-	-	-	

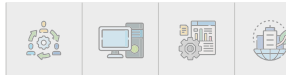
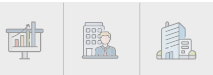
B. Kewajiban Rekening Administratif

1	Komitmen	20.977.203	-	-	19.170.698	-	-	-	
	a. Fasilitas kredit yang belum ditarik	19.138.038	-	-	19.138.038	-	-	-	
	b. Irrevocable L/C yang masih berjalan	18.496	-	-	18.496	-	-	-	
	c. Posisi Penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	1.806.505	-	-	-	-	-	-	
	1) Spot	-	-	-	-	-	-	-	
	2) Derivat	1.806.505	-	-	-	-	-	-	
	d. Lainnya	14.164	-	-	14.164	-	-	-	
2	Kontijensi	2.502.757	-	-	2.502.757	-	-	-	
	Jumlah Kewajiban Rekening Administratif	21.640.795	-	-	21.673.455	-	-	-	
	Selisih Tagihan dan Kewajiban dalam Rekening Administratif	3.358.190	-	-	3.325.530	-	-	-	
	Selisih [(IA-IB)+(IIA-IIB)]	42.604.335	(77.607.561)	(15.381.751)	(38.561.698)	(34.096.909)	(18.082.373)	(23.657.534)	
	Selisih Kumulatif	40.765.170	(77.607.561)	(92.989.312)	(131.551.010)	(165.647.919)	(183.730.292)	(207.387.826)	

		31 Desember 2022						
		Saldo	Jatuh Tempo					
	> 12 bulan		s.d 1 minggu	> 1 minggu s.d 2 minggu	> 2 minggu s.d 1 bulan	> 1 bulan s.d 3 bulan	> 3 bulan s.d 6 bulan	> 6 bulan s.d 12 bulan
-		430.656	430.656	-	-	-	-	-
-		11.726.704	-	-	11.726.704	-	-	-
90.632.695		368.500.395	118.421.401	21.122.406	64.589.267	42.991.121	24.461.778	12.495.938
249.959.501		35.295.638	(74.035.893)	(20.252.567)	(41.922.206)	(30.318.287)	(15.034.209)	(2.528.643)

-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	19.459.686	-	-	19.459.686	-	-	-	-
-	19.459.686	-	-	19.459.686	-	-	-	-

1.806.505	19.058.474	-	339.313	16.581.426	-	331.410	-	1.806.325
-	16.363.226	-	-	16.363.226	-	-	-	-
-	204.672	-	-	204.672	-	-	-	-
1.806.505	2.477.048	-	339.313	-	-	331.410	-	1.806.325
-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.806.505	2.477.048	-	339.313	-	-	331.410	-	1.806.325
-	13.529	-	-	13.529	-	-	-	-
-	964.107	-	-	964.107	-	-	-	-
1.806.505	20.022.580	-	339.313	17.545.533	-	331.410	-	1.806.325
(1.806.505)	(562.894)	-	(339.313)	1.914.154	-	(331.410)	-	(1.806.325)
248.152.996	34.732.744	(74.035.893)	(20.591.880)	(40.008.052)	(30.318.287)	(15.365.619)	(2.528.643)	217.581.117
40.765.170	34.732.744	(74.035.893)	(94.627.773)	(134.635.825)	(164.954.112)	(180.319.730)	(182.848.373)	34.732.744

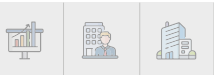


Tabel Profil Maturitas Valuta Asing

No	Pos-pos	31 Desember 2023							
		Saldo	Jatuh Tempo						
			s.d 1 minggu	> 1 minggu s.d 2 minggu	> 2 minggu s.d 1 bulan	> 1 bulan s.d 3 bulan	> 3 bulan s.d 6 bulan	> 6 bulan s.d 12 bulan	
I. Neraca									
A. Aset									
1	Kas	32.111	32.111	-	-	-	-	-	
2	Penempatan pada Bank Indonesia	19.257.856	19.104.196	153.661	-	-	-	-	
3	Penempatan pada bank lain	1.969.352	1.969.352	-	-	-	-	-	
4	Surat Berharga	4.756.845	-	-	-	-	188.407	138.629	
	a. SUN	4.456.411	-	-	-	-	-	138.629	
	1) diperdagangkan	2.379	-	-	-	-	-	2.379	
	2) tersedia untuk di jual	3.980.972	-	-	-	-	-	-	
	3) dimiliki hingga jatuh tempo	473.061	-	-	-	-	-	136.250	
	4) pinjaman yang diberikan pada piutang	-	-	-	-	-	-	-	
	b. Surat Berharga Korporasi	300.434	-	-	-	-	188.407	-	
	1) diperdagangkan	-	-	-	-	-	-	-	
	2) tersedia untuk dijual	300.434	-	-	-	-	188.407	-	
	3) dimiliki hingga jatuh tempo	-	-	-	-	-	-	-	
	4) pinjaman yang diberikan dan piutang	-	-	-	-	-	-	-	
	c. Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	
5	Kredit yang diberikan	2.460.281	-	-	-	-	-	230.955	
	a. Belum Jatuh Tempo	2.460.281	-	-	-	-	-	230.955	
	b. Sudah Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	-	-	
6	Tagihan lainnya	64.516	64.516	-	-	-	-	-	
	a. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (Reverse Repo)	-	-	-	-	-	-	-	
	b. Lainnya	64.516	64.516	-	-	-	-	-	
7	Lain-lain	1.092.189	-	-	1.092.189	-	-	-	
	Jumlah Aset	29.633.150	21.170.174	153.661	1.092.189	-	188.407	369.584	
B. Kewajiban									
1	Dana Pihak Ketiga	25.415.442	18.662.384	824.462	2.090.700	1.732.429	1.371.955	733.513	
	a. Giro	18.457.944	18.457.944	-	-	-	-	-	
	b. Tabungan	193.982	193.982	-	-	-	-	-	
	c. Simpanan Berjangka	6.763.517	10.458	824.462	2.090.700	1.732.429	1.371.955	733.513	
	1) Deposit on call	-	-	-	-	-	-	-	
	2) Deposito Berjangka	6.763.517	10.458	824.462	2.090.700	1.732.429	1.371.955	733.513	
	3) Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	
2	Kewajiban pada Bank Indonesia	-	-	-	-	-	-	-	
3	Kewajiban pada bank lain	-	-	-	-	-	-	-	
4	Surat Berharga yang Diterbitkan	4.612.840	-	-	-	-	-	-	
	a. Obligasi	-	-	-	-	-	-	-	
	b. Subordinasi	4.612.840	-	-	-	-	-	-	
	c. Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	
5	Pinjaman yang Diterima	750.059	-	-	-	-	-	-	
	a. Pinjaman Subordinasi	-	-	-	-	-	-	-	
	b. Lainnya	750.059	-	-	-	-	-	-	

(dalam jutaan Rupiah)

31 Desember 2022									
		Saldo	Jatuh Tempo						
	> 12 bulan		s.d 1 minggu	> 1 minggu s.d 2 minggu	> 2 minggu s.d 1 bulan	> 1 bulan s.d 3 bulan	> 3 bulan s.d 6 bulan	> 6 bulan s.d 12 bulan	> 12 bulan
-		15.694	15.694	-	-	-	-	-	-
-		222.943	222.943	-	-	-	-	-	-
-		932.205	932.205	-	-	-	-	-	-
4.429.809		4.841.243	-	-	-	128.588	62.270	31.135	4.619.250
4.317.783		4.544.748	-	-	-	128.588	62.270	31.135	4.322.756
-		-	-	-	-	-	-	-	-
3.980.972		3.831.559	-	-	-	-	-	-	3.831.559
336.811		713.190	-	-	-	128.588	62.270	31.135	491.197
-		-	-	-	-	-	-	-	-
112.027		296.495	-	-	-	-	-	-	296.495
-		-	-	-	-	-	-	-	-
112.027		296.495	-	-	-	-	-	-	296.495
-		-	-	-	-	-	-	-	-
-		-	-	-	-	-	-	-	-
-		-	-	-	-	-	-	-	-
2.229.326		1.168.755	-	-	-	-	-	-	1.168.755
2.229.326		1.168.755	-	-	-	-	-	-	1.168.755
-		-	-	-	-	-	-	-	-
-		-	-	-	-	-	-	-	-
-		-	-	-	-	-	-	-	-
-		-	-	-	-	-	-	-	-
-		-	-	-	-	-	-	-	-
-		-	-	-	-	-	-	-	-
-		971.042	-	-	971.042	-	-	-	-
6.659.136		8.151.883	1.170.842	-	971.042	128.588	62.270	31.135	5.788.005
-		2.938.717	1.917.754	50.021	130.345	811.652	26.105	2.840	-
-		1.809.479	1.809.479	-	-	-	-	-	-
-		102.646	102.646	-	-	-	-	-	-
-		1.026.593	5.629	50.021	130.345	811.652	26.105	2.840	-
-		-	-	-	-	-	-	-	-
-		1.026.593	5.629	50.021	130.345	811.652	26.105	2.840	-
-		-	-	-	-	-	-	-	-
-		-	-	-	-	-	-	-	-
-		-	-	-	-	-	-	-	-
4.612.840		4.658.242	-	-	-	-	-	-	4.658.242
-		-	-	-	-	-	-	-	-
4.612.840		4.658.242	-	-	-	-	-	-	4.658.242
-		-	-	-	-	-	-	-	-
750.059		807.763	-	-	-	-	-	-	807.763
-		-	-	-	-	-	-	-	-
750.059		807.763	-	-	-	-	-	-	807.763



No	Pos-pos	31 Desember 2023						
		Saldo	Jatuh Tempo					
			s.d 1 minggu	> 1 minggu s.d 2 minggu	> 2 minggu s.d 1 bulan	> 1 bulan s.d 3 bulan	> 3 bulan s.d 6 bulan	> 6 bulan s.d 12 bulan
6	Kewajiban lainnya	-	-	-	-	-	-	-
	a. Kewajiban atas surat berharga yang di jual dengan janji dibeli kembali (Repo)	-	-	-	-	-	-	-
	b. Lainnya	-	-	-	-	-	-	-
7	Lain-lain	145.511	-	-	145.511	-	-	-
	Jumlah Kewajiban	30.923.852	18.662.384	824.462	2.236.211	1.732.429	1.371.955	733.513
	Selisih Aset dengan Kewajiban dalam Neraca	(1.290.702)	2.507.791	(670.802)	(1.144.022)	(1.732.429)	(1.183.548)	(363.929)
II. Rekening Administratif								
A.	Tagihan Rekening Administratif							
1	Komitmen	1.878.434	-	-	-	-	-	-
	a. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik	-	-	-	-	-	-	-
	b. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	1.878.434	-	-	-	-	-	-
	1) Spot	-	-	-	-	-	-	-
	2) Derivatif	1.878.434	-	-	-	-	-	-
	c. Lainnya	-	-	-	-	-	-	-
2	Kontijensi	488.686	-	-	488.686	-	-	-
	Jumlah Tagihan Rekening Administratif	2.367.120	-	-	488.686	-	-	-
B.	Kewajiban Rekening Administratif							
1	Komitmen	-	-	-	653.587	-	-	-
	a. Fasilitas kredit yang belum ditarik	-	-	-	653.587	-	-	-
	b. Irrevocable L/C yang masih berjalan	-	-	-	-	-	-	-
	c. Posisi Penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	-	-	-	-	-	-	-
	1) Spot	-	-	-	-	-	-	-
	2) Derivat	-	-	-	-	-	-	-
	d. Lainnya	-	-	-	-	-	-	-
2	Kontijensi	-	-	-	476.264	-	-	-
	Jumlah Kewajiban Rekening Administratif	-	-	-	1.129.851	-	-	-
	Selisih Tagihan dan Kewajiban dalam Rekening Administratif	2.367.120	-	-	(641.165)	-	-	-
	Selisih [(IA-IB)+(IIA-IIIB)]	1.076.419	2.507.791	(670.802)	(1.785.187)	(1.732.429)	(1.183.548)	(363.929)
	Selisih Kumulatif	(53.433)	2.507.791	1.836.989	51.802	(1.680.627)	(2.864.174)	(3.228.103)

Tabel Liquidity Coverage Ratio (LCR)

(dalam %)

	2023				2022			
	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
Bank Secara Individu	247,26%	204,17%	171,38%	190,24%	255,03%	233,16%	238,80%	238,50%

		31 Desember 2022							
		Saldo	Jatuh Tempo						
	> 12 bulan		s.d 1 minggu	> 1 minggu s.d 2 minggu	> 2 minggu s.d 1 bulan	> 1 bulan s.d 3 bulan	> 3 bulan s.d 6 bulan	> 6 bulan s.d 12 bulan	> 12 bulan
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	113.736	-	-	113.736	-	-	-	-
5.362.899	8.518.458	1.917.754	50.021	244.081	811.652	26.105	2.840	5.466.004	
1.296.237	(366.575)	(746.911)	(50.021)	726.961	(683.065)	36.165	28.295	322.001	
1.878.434	2.625.536	-	389.188	-	-	351.737	-	1.884.612	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.878.434	2.625.536	-	389.188	-	-	351.737	-	1.884.612	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.878.434	2.625.536	-	389.188	-	-	351.737	-	1.884.612	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	76.436	-	-	76.436	-	-	-	-	
1.878.434	2.701.972	-	389.188	76.436	-	351.737	-	1.884.612	
-	279.023	-	-	279.023	-	-	-	-	
-	279.023	-	-	279.023	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	61.173	-	-	61.173	-	-	-	-	
-	340.196	-	-	340.196	-	-	-	-	
1.878.434	2.361.776	-	389.188	(263.760)	-	351.737	-	1.884.612	
3.174.671	1.995.201	(746.911)	339.166	463.202	(683.065)	387.902	28.295	2.206.613	
(53.433)	1.995.201	(746.911)	(407.745)	55.456	(627.608)	(239.707)	(211.412)	1.995.201	



HUMAN CAPITAL



“

Sebagai upaya penyempurnaan dalam teknologi pengelolaan *Human Capital* yang termasuk dalam inisiatif strategis *Human Capital* sampai dengan tahun 2025, di tahun 2023 telah dimulai proses transformasi *HC Technology* dengan mengembangkan *Human Capital Information System (HCIS)* berbasis *cloud*.

Program Kerja Pengembangan Sumber Daya Manusia —



Dalam rangka mewujudkan “*One of Home of Indonesia’s Best Talent*”, program kerja pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pada jangka pendek dan menengah diselenggarakan dengan *Corporate Plan* Tahun 2021-2025. Rencana Jangka Menengah Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) memiliki tujuan besar yaitu Bank BTN mampu menarik dan mempertahankan talenta terbaik Indonesia yang memiliki kapabilitas unggul dengan tingkat produktivitas yang tinggi untuk mencapai tujuan strategis dan target bisnis Perseroan.

Dalam rangka mewujudkan *Endstate Human Capital* Bank BTN tersebut, telah dirumuskan 4 (empat) dimensi *Endstate* yang menjadi parameter keberhasilan tercapainya kondisi “*One of Home of Indonesia’s Best Talent*” tersebut yaitu:

- Ability to Attract Top Talent*, yaitu Bank BTN menjadi salah satu *top of mind employer* bagi kandidat eksternal dari perusahaan maupun universitas terkemuka di Indonesia.
- Ability to Retain Top Talents*, yaitu Bank BTN mampu mempertahankan *top talents* untuk terus berkarya dan berkembang bersama Bank BTN.
- Talents’ Capability Readiness*, yaitu Bank BTN memiliki kapabilitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan strategis Bank di masa ini dan masa depan.
- Employee Productivity*, yaitu produktivitas pegawai Bank BTN berada di atas rata-rata organisasi ternama.

Untuk mencapai parameter dimensi *Endstate* tersebut maka telah disusun 3 (tiga) Strategi dan 14 (empat belas) Inisiatif Strategis yaitu sebagai berikut:

- Menjadi pilihan utama tempat bekerja talenta terbaik melalui perbaikan proses rekrutmen dan *onboarding* yang memberikan *employee experience* sistem *reward* yang memotivasi dan kompetitif dipasar, serta aktivasi *Employee Value Proposition* Perseroan.
- Penguatan kapabilitas, produktivitas, dan daya saing SDM melalui perbaikan program penguatan kapabilitas pegawai, intervensi untuk mendukung budaya pembelajaran, penerapan *coaching* yang konsisten, serta penerapan ukuran produktivitas dalam *workforce planning* dan *performance management*.
- Fokus pada penciptaan nilai dan menjadi *partner* Bisnis melalui *organization alignment* untuk mendorong fungsi *partner* bisnis, penerapan Digital HR untuk mendukung *operational excellence* dan pengambilan keputusan, serta Implementasi Internalisasi *Corporate Culture*.

Khusus pada tahun 2023, strategi *Human Capital* (HC) berfokus pada *Business Partnering* dan *Talent Development* yang terdiri dari:

- Mengembangkan Struktur organisasi HCBP menjadi suatu Divisi tersendiri untuk menyelaraskan strategi HC dengan Bisnis serta menjawab kebutuhan Perseroan, yang dibagi atas:
 - Bidang *Wholesale, Consumer Banking & Finance*
 - Bidang HCBP *IT & Operations*
 - Bidang HCBP *Distribution & Funding*
 - Bidang HCBP *Risk Management*

2. Perbaikan lebih lanjut untuk meningkatkan *operational excellence* dan praktik manajemen SDM.
3. Menerapkan metodologi dan matriks pengukuran produktivitas yang sistematis untuk segmen bisnis dan *support*.
4. Implementasi perencanaan tenaga kerja yang prediktif dan berbasis pada produktivitas.
5. Mempertajam *learning strategy*, penerapan *coaching* secara konsisten, serta melakukan intervensi untuk mendukung budaya pembelajaran.
6. Menjalankan manajemen suksesi untuk memastikan pemenuhan posisi kunci/kritikal dan menutup *generation gap*.
7. Mengimplementasikan prinsip dan tata kelola manajemen kinerja yang terintegrasi serta menerapkan penilaian kinerja multi sumber untuk memastikan objektivitas menyeluruh.
8. Mengaktivasi 4 (empat) Pilar EVP - *Learn, Grow, Contribute*, dan *Engagement* dalam mendorong peningkatan *branding* Bank BTN.
9. Implementasi strategi *multi-sourcing* dan menjalankan program *onboarding* untuk *new recruit* dan *internal movement*.
10. Mengimplementasikan HCIS yang terintegrasi untuk mendukung operasional *excellence*, pengambilan keputusan berbasis data, serta menyediakan *seamless employee experience*.

Kebijakan dan Pelaksanaan Manajemen Human Capital —

Rekrutmen

Kebijakan

Bank BTN memiliki berbagai *channel* rekrutmen yang memberikan kesempatan bagi berbagai lapisan masyarakat untuk bergabung bersama Bank BTN. Ketentuan mengenai rekrutmen diatur dalam Kebijakan Khusus No. KK3.A tanggal 31 Oktober 2023 tentang Siklus *Human Capital*, dan secara detail pada Petunjuk Teknis (PT) No. 3-A.11 tanggal 31 Oktober 2023 tentang Rekrutmen dan Seleksi. Pelaksanaan rekrutmen pegawai tahun 2023 dilakukan melalui berbagai *channel* rekrutmen dari eksternal maupun internal untuk memastikan pemenuhan pegawai di unit kerja sesuai dengan kebutuhan jumlah maupun kapabilitas. Pelaksanaan Rekrutmen di Perseroan telah menerapkan kesetaraan gender dan kesempatan bagi penyandang disabilitas. Sebagai bentuk perbaikan dalam *timeline* pemenuhan pegawai, pemenuhan kebutuhan pegawai di tahun 2024 sudah dilakukan rekrutmen sejak tahun 2023, sehingga proses *deployment* pegawai dilakukan di awal tahun 2024 untuk mendukung percepatan bisnis tahun 2024.

Sesuai ketentuan Petunjuk Teknis (PT) No. 3-A.11 tentang Rekrutmen dan Seleksi diatur pula mengenai rekrutmen Disabilitas yaitu jenis disabilitas yang memenuhi kriteria calon Pegawai disabilitas yakni untuk sementara ditetapkan jenis Tuna Daksa (ringan) dan Tuna Wicara, akan tetapi tidak menutup kemungkinan untuk menetapkan jenis disabilitas lain pada rekrutmen selanjutnya sekaligus mempersiapkan akomodasi yang layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh Pegawai Disabilitas.

Pelaksanaan Rekrutmen

Selama tahun 2023 telah dilaksanakan rekrutmen penyandang disabilitas. Program tersebut merupakan program dari Kementerian BUMN melalui *Forum Human Capital* Indonesia (FHCI) dan didapatkan 4 (empat) pegawai Disabilitas. Sedangkan di tahun 2024 ditargetkan rekrutmen untuk 10 (sepuluh) pegawai disabilitas baru. Selama tahun 2023 telah dilakukan rekrutmen sebanyak 584 pegawai yang terdiri dari 226 pria dan 358 wanita.

Adapun strategi serta program yang dilakukan dalam rangka rekrutmen tahun 2023 yaitu:

Campus/University Hiring

- *Job Career* UI
- *Job Career* Unhas
- *Job Career* UGM
- *Job Career* Unair
- *Job Career* UNS
- *Sourcing Best Alumni* dari Top Ten Univ
- *Beasiswa Pre Graduate* (UI, UGM, Unair, ITB)

Seminar/Workshop

- *Workshop Career* UGM
- *Workshop Career* ITB
- *Workshop Career* UNAIR

Social Media Recruiting

- *Open Recruitment* ODP Bisnis
- *Open Recruitment* Frontliner
- *Open Recruitment* ODP Tematik
- *Open Recruitment Experienced* dan *Prohire*

Referral Program

Rekrutmen *Pro Hire* di bidang spesialis seperti IT, *Digital Banking*, *Wholesale Transaction*, *Personal Banking*, *Treasury*, *Wealth Management* dan *Non-Subsidized Mortgage*.

Kerjasama dan Kemitraan dengan Stakeholder

- Rekrutmen Bersama BUMN (FHCI)
- Digierss Day Menkominfo
- Kerja sama LPDP
- Indonesia Career Excellence – Inggris/UK
- Kerja sama Head-Hunter
- Kerja sama LinkedIn

Talent Scouting

- *Talent Scouting* Universitas Sumatera Utara (USU)
- Srikandi BTN Universitas Trisakti
- *Talent Scouting* Institute Teknologi Bandung (ITB)

Untuk jalur rekrutmen yang dilakukan di tahun 2023 yaitu:

- Teller Service (TS)**
- Customer Service (CS)**
- General Banking Staff (GBS)**
 - GBS FHCI
 - GBS Alih Status ODP

- GBS Telkom Career Day
- GBS Regular
- GBS Talent Scouting UB
- GBS Talent Scouting UGM
- GBS Talent Scouting USU
- GBS Job Fair UNHAS
- GBS Job Fair UI
- GBS Job Fair Unpad
- GBS Job Fair UB
- GBS RBB Regular
- GBS RBB Disabilitas
- Alih Status Pemenang Sales Service Awards (BSS)

d. Officer Development Program (ODP)

- *ODP Risk Management*
- *ODP Auditor*
- *ODP Business Banking*
- *ODP Business Enabler*
- *ODP IT*
- *ODP Wholesale & Finance*

e. Experienced/Pro Hire

Adapun realisasi rekrutmen tahun 2023 yaitu sebagai berikut:

No.	Jalur Rekrutmen	Jumlah
1.	<i>Frontliner</i>	244
	a. Customer Service Staff Batch 1	99
	b. Teller Service Staff Batch 1	85
	c. Customer Service Staff Batch 2	39
	d. Teller Service Staff Batch 2	21
2.	<i>General Banking Staff</i>	237
	a. GBS FHCI	15
	b. GBS Alih Status ODP	21
	c. GBS Telkom Career Day	12
	d. GBS Regular	105
	e. GBS Talent Scouting UB	8
	f. GBS Talent Scouting UGM	4
	g. GBS Talent Scouting USU	8
	h. GBS Job Fair UNHAS	8
	i. GBS Job Fair UI	9
	j. GBS Job Fair Unpad	16
	k. GBS Job Fair UB	7
	l. GBS RBB Regular	15
	m. GBS RBB Disabilitas	4
	n. Alih Status Pemenang SSA (BSS)	5
3.	<i>Officer Development Program</i>	67
	a. ODP Bidang Bisnis Regular	62
	b. Beasiswa Pre-Graduate	4
	c. ODP Beasiswa LPDP	1
4.	<i>Experienced/Pro-Hire Hiring</i>	36
TOTAL		584

Pengembangan Kompetensi

Kebijakan

Pengembangan kompetensi *hard skill* maupun *soft skill* menjadi salah satu bagian dari pedoman siklus *Human Capital* dalam pengelolaan Sumber Daya Manusia sesuai dengan Kebijakan Khusus No. KK.3-A tanggal 31 Oktober 2023 tentang Siklus *Human Capital*. Setiap pegawai wajib untuk mengembangkan kompetensinya agar dapat melakukan pekerjaan dengan baik, dan mempersiapkan diri untuk dapat menghadapi perubahan dan/atau menduduki jabatan yang lebih tinggi.

Pengembangan kompetensi pegawai dilakukan melalui program pembelajaran dan pengembangan yang sistematis untuk meningkatkan pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*), dan sikap (*attitude*). *Framework* pembelajaran dan pengembangan menerapkan konsep *Analysis, Design, Development*,

Implementation dan *Evaluation* (ADDIE) dengan menggunakan model pembelajaran 10:20:70 (10% *formal learning*, 20% *learning from others* dan 70% *learning from doing*).

Pembelajaran dan pengembangan dimaksud diberikan kepada pegawai mulai dari fase pegawai yang baru ditempatkan pada suatu jabatan hingga diproyeksikan ke jabatan di atasnya. Dalam hal ini setiap pegawai memperoleh kesempatan yang sama dalam bidang pembelajaran dan pengembangan.

Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi

Perseroan melakukan program pembelajaran dan pengembangan untuk memenuhi kompetensi yang dibutuhkan secara berkesinambungan melalui pembelajaran, pengembangan, penugasan khusus maupun program mutasi dan promosi. Berikut tabel jumlah pengembangan kompetensi berdasarkan Level Jabatan pada periode Januari – Desember 2023:

Tabel Pengembangan Kompetensi Berdasarkan Level Jabatan Tahun 2023

No.	Jenis Pelatihan	Tujuan Pelatihan	Jumlah	Jumlah Peserta yang telah mengikuti pelatihan	Persentase yang telah mengikuti pelatihan untuk setiap level jabatan	Persentase yang telah mengikuti pelatihan untuk setiap jenis pelatihan
1.	DIREKSI		10	10	100%	
	<i>Leadership</i>	Meningkatkan kompetensi dalam kepemimpinan dan peningkatan jenjang karir		10		100%
	<i>Operational Banking</i>	Meningkatkan kompetensi dalam kegiatan operasional Perseroan		6		60%
	<i>Sales & Service</i>	Meningkatkan kompetensi pada bidang <i>sales and service</i>		1		10%
2.	KOMISARIS		8	8	100%	
	<i>Leadership</i>	Meningkatkan kompetensi dalam kepemimpinan dan peningkatan jenjang karir		8		100%
	<i>Operational Banking</i>	Meningkatkan kompetensi dalam kegiatan operasional Perseroan		1		13%
3.	EXECUTIVE VICE PRESIDENT		32	32	100%	
	<i>Credit & Risk</i>	Meningkatkan kompetensi di bidang kredit dan risiko kredit		15		47%
	<i>Leadership</i>	Meningkatkan kompetensi kepemimpinan pegawai dan peningkatan jenjang karir		31		97%
	<i>Operational Banking</i>	Meningkatkan kompetensi pegawai dalam kegiatan operasional Perseroan		32		100%
	<i>Sales & Service</i>	Meningkatkan kompetensi pegawai di bidang <i>sales and service</i>		31		97%
4.	VICE PRESIDENT		128	128	100%	
	<i>Business & Sharia Banking</i>	Meningkatkan kompetensi pegawai dalam hal <i>sales, marketing</i> , pengetahuan umum dan sebagainya dalam bidang <i>Sharia Banking</i>		6		5%
	<i>Credit & Risk</i>	Meningkatkan kompetensi di bidang kredit dan risiko kredit		66		52%

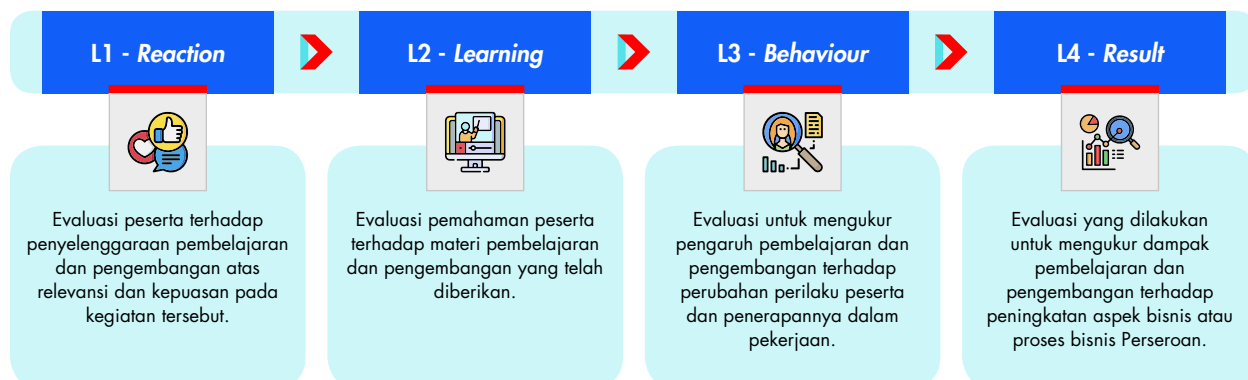
No.	Jenis Pelatihan	Tujuan Pelatihan	Jumlah	Jumlah Peserta yang telah mengikuti pelatihan	Persentase yang telah mengikuti pelatihan untuk setiap level jabatan	Persentase yang telah mengikuti pelatihan untuk setiap jenis pelatihan
	<i>Leadership</i>	Meningkatkan kompetensi kepemimpinan pegawai dan peningkatan jenjang karir		81		63%
	<i>Operational Banking</i>	Meningkatkan kompetensi pegawai dalam kegiatan operasional Perseroan		127		99%
	<i>Sales & Service</i>	Meningkatkan kompetensi pegawai di bidang <i>sales and service</i>		117		91%
5.	ASSISTANT VICE PRESIDENT		163	163	100%	
	<i>Business & Sharia Banking</i>	Meningkatkan kompetensi pegawai dalam hal <i>sales, marketing</i> , pengetahuan umum dan sebagainya dalam bidang <i>Sharia Banking</i>		9		6%
	<i>Credit & Risk</i>	Meningkatkan kompetensi di bidang kredit dan risiko kredit		98		60%
	<i>Leadership</i>	Meningkatkan kompetensi kepemimpinan pegawai dan peningkatan jenjang karir		70		43%
	<i>Operational Banking</i>	Meningkatkan kompetensi pegawai dalam kegiatan operasional Perseroan		163		100%
	<i>Sales & Service</i>	Meningkatkan kompetensi pegawai di bidang <i>sales and service</i>		158		97%
6.	SENIOR MANAGER		200	200	100%	
	<i>Business & Sharia Banking</i>	Meningkatkan kompetensi pegawai dalam hal <i>sales, marketing</i> , pengetahuan umum dan sebagainya dalam bidang <i>Sharia Banking</i>		30		15%
	<i>Credit & Risk</i>	Meningkatkan kompetensi di bidang kredit dan risiko kredit		124		62%
	<i>Leadership</i>	Meningkatkan kompetensi kepemimpinan pegawai dan peningkatan jenjang karir		125		63%
	<i>Operational Banking</i>	Meningkatkan kompetensi pegawai dalam kegiatan operasional Perseroan		200		100%
	<i>Sales & Service</i>	Meningkatkan kompetensi pegawai di bidang <i>sales and service</i>		192		96%
7.	MANAGER		1.074	1.074	100%	
	<i>Business & Sharia Banking</i>	Meningkatkan kompetensi pegawai dalam hal <i>sales, marketing</i> , pengetahuan umum dan sebagainya dalam bidang <i>sharia banking</i>		125		12%
	<i>Credit & Risk</i>	Meningkatkan kompetensi di bidang kredit dan risiko kredit		737		69%
	<i>Leadership</i>	Meningkatkan kompetensi kepemimpinan pegawai dan peningkatan jenjang karir		306		28%
	<i>Operational Banking</i>	Meningkatkan kompetensi pegawai dalam kegiatan operasional Perseroan		1.074		100%
	<i>Sales & Service</i>	Meningkatkan kompetensi pegawai di bidang <i>sales and service</i>		1.023		95%
8.	ASSISTANT MANAGER		2.911	2.911	100%	
	<i>Business & Sharia Banking</i>	Meningkatkan kompetensi pegawai dalam hal <i>sales, marketing</i> , pengetahuan umum dan sebagainya dalam bidang <i>sharia banking</i>		383		13%
	<i>Credit & Risk</i>	Meningkatkan kompetensi di bidang kredit dan risiko kredit		1.844		481%
	<i>Leadership</i>	Meningkatkan kompetensi kepemimpinan pegawai dan peningkatan jenjang karir		666		36%

No.	Jenis Pelatihan	Tujuan Pelatihan	Jumlah	Jumlah Peserta yang telah mengikuti pelatihan	Persentase yang telah mengikuti pelatihan untuk setiap level jabatan	Persentase yang telah mengikuti pelatihan untuk setiap jenis pelatihan
	<i>Operational Banking</i>	Meningkatkan kompetensi pegawai dalam kegiatan operasional Perseroan		2.877		432%
	<i>Sales & Service</i>	Meningkatkan kompetensi pegawai di bidang <i>sales and service</i>		2.796		97%
9.	SENIOR STAFF		5.703	5.703	100%	
	<i>Business & Sharia Banking</i>	Meningkatkan kompetensi pegawai dalam hal sales, marketing, pengetahuan umum dan sebagainya dalam bidang <i>Sharia Banking</i>		748		13%
	<i>Credit & Risk</i>	Meningkatkan kompetensi di bidang kredit dan risiko kredit		3.834		67%
	<i>Leadership</i>	Meningkatkan kompetensi kepemimpinan pegawai dan peningkatan jenjang karir		1.483		26%
	<i>Operational Banking</i>	Meningkatkan kompetensi pegawai dalam kegiatan operasional Perseroan		5.703		100%
	<i>Sales & Service</i>	Meningkatkan kompetensi pegawai di bidang <i>sales and service</i>		5272		92%
10.	STAFF		1.834	1.834	100%	
	<i>Business & Sharia Banking</i>	Meningkatkan kompetensi pegawai dalam hal sales, marketing, pengetahuan umum dan sebagainya dalam bidang <i>Sharia Banking</i>		253		14%
	<i>Credit & Risk</i>	Meningkatkan kompetensi di bidang kredit dan risiko kredit		1.467		80%
	<i>Leadership</i>	Meningkatkan kompetensi kepemimpinan pegawai dan peningkatan jenjang karir		499		27%
	<i>Operational Banking</i>	Meningkatkan kompetensi pegawai dalam kegiatan operasional Perseroan		1.834		100%
	<i>Sales & Service</i>	Meningkatkan kompetensi pegawai di bidang <i>sales and service</i>		1.723		94%
JUMLAH TOTAL			12.063	12.063	100%	

Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi

Peningkatan kualitas serta relevansi penyelenggaraan pembelajaran dan pengembangan dengan kebutuhan Perseroan diidentifikasi berdasarkan evaluasi pelaksanaan kegiatan

pembelajaran dan pengembangan. Perseroan melakukan evaluasi dengan menggunakan metode KirkPatrick yang terdiri dari 4 (empat) level, yaitu:



Biaya Pengembangan Kompetensi

Tahun 2023 Perseroan telah mengalokasikan biaya pengembangan kompetensi bagi pegawai yang tercatat mengalami peningkatan sebesar 10% dibandingkan tahun 2022, Perseroan menetapkan metode *delivery blended learning* yaitu penggabungan *online learning* dan *classroom* sehingga pelaksanaan pembelajaran dan pengembangan menjadi lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan nilai tambah bagi para pegawai salah satunya melalui pemenuhan kompetensi yang dipersyaratkan.

Selain itu, di tahun 2023 Pemerintah Indonesia secara resmi mencabut status Pandemi Covid-19 menjadi masa Endemi Covid-19 sehingga beberapa program pembelajaran dan pengembangan mulai dilaksanakan kembali dengan metode *classroom*. Adapun besaran biaya pengembangan kompetensi secara total dapat dilihat pada tabel berikut:

Biaya pengembangan kompetensi (dalam jutaan Rupiah)		Pertumbuhan	
2023	2022	Dalam mata uang (dalam jutaan Rupiah)	Dalam Persen (%)
95.928	86.945	8.983	10%

Pengembangan Karir

Kebijakan

Pengembangan karir di Bank BTN mengacu pada ketentuan Kebijakan Khusus No. KK.3-A tanggal 31 Oktober 2023 Tentang Siklus *Human Capital*. Bank BTN memiliki 2 (dua) jalur karir, yaitu jalur karir umum dan jalur karir khusus (*specialist*). Jalur karir umum merupakan aturan yang umum yang menjelaskan perpindahan dari satu jabatan ke jabatan lainnya (dari *Job Feeder* tertentu ke *Job Target* tertentu) yang ditentukan berdasarkan layer jabatan, *job grade*, dan risiko pergerakan karir pegawai. Sedangkan jalur karir khusus merupakan suatu jalur karir yang dibuat spesifik untuk pemenuhan jabatan tertentu pada Perseroan yang mana memiliki kemampuan/keterampilan teknis dan/atau disiplin ilmu tertentu bidang tertentu yang dibutuhkan oleh bisnis Bank.

Secara umum Perseroan memiliki ketentuan terkait pola pergerakan karir pegawai. Pola Pergerakan karir yang di atur untuk seluruh pegawai yaitu *acceleration track*, *fast track*, *middle track*, *normal track*, *moderate track*, dan *slow track*. Adapun pola karir tersebut ditentukan berdasarkan pemetaan talenta (*talent mapping*). *Talent Mapping* sebagai dasar dalam pengelolaan karir pegawai, dilakukan dengan melakukan pengelompokan pegawai berdasarkan Potensi dan Kinerja pegawai.

Talent mapping pegawai terdiri dari aspek kinerja dan aspek potensi. Aspek kinerja dan aspek potensi masing-masing dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kriteria yaitu rendah, sedang dan tinggi.

- Aspek kinerja diambil berdasarkan penilaian pegawai Sistem Manajemen Kinerja (SMK) 3 (tiga) tahun Aspek kinerja berdasarkan penilaian kinerja pegawai yang tertuang dalam Sistem Manajemen Kinerja (SMK) pegawai dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir dari terhitung saat Pemetaan Talenta (*Talent Mapping*) dilakukan.

- Aspek potensi dilihat dari 2 (dua) pengukuran sebagai berikut:
 - Assessment Kognitif* (bobot 20%) yaitu mengukur Kapasitas *Learning Agility* yang terdiri dari kecepatan belajar, kemampuan beradaptasi dengan perubahan, dan kemampuan dalam menghadapi tantangan baru pada pekerjaan.
 - Assessment Kompetensi Perilaku* (bobot 80%) yaitu mengukur tingkat efektivitas dalam menjalankan pekerjaan yang berhubungan dengan sikap kerja dan aspek-aspek kepribadian.

Adapun pemetaan talenta pegawai adalah sebagai berikut:

Performance	Tinggi	7. <i>Solid Contributor</i>	8. <i>Perform</i>	9. <i>Star</i>
	Sedang	4. <i>Slow Starter</i>	5. <i>Average</i>	6. <i>Potensial</i>
	Rendah	1. <i>Unfit</i>	2. <i>Slow Starter</i>	3. <i>Career Person</i>
		Rendah	Sedang	Tinggi
		Potensi		

Pola Pergerakan Karir Pegawai

- Acceleration Track*: Pegawai yang masuk dalam kategori Suksesor dimungkinkan kesempatan promosi kurang dari 1 tahun.
- Fast Track*: Pegawai yang termasuk dalam kelompok Star dan Performer berdasarkan hasil Pemetaan Talent

(*Talent Mapping*) dapat dipromosikan 1 (satu) tahun sejak menduduki *Person Grade* terakhir.

3. *Middle Track*: Pegawai yang termasuk dalam kelompok Potential berdasarkan hasil Pemetaan *Talent (Talent Mapping)* dapat dipromosikan 2 (dua) tahun sejak menduduki *Person Grade* terakhir.
4. *Normal Track*: Pegawai yang termasuk dalam kelompok *Average* berdasarkan hasil Pemetaan *Talent (Talent Mapping)* dapat dipromosikan 3 (tiga) tahun sejak menduduki *Person Grade* terakhir.
5. *Moderate Track*: Pegawai yang termasuk dalam kelompok *Solid Contributor* berdasarkan hasil Pemetaan talent (*Talent Mapping*) dapat dipromosikan 4 (empat) tahun sejak menduduki *Person Grade* terakhir.
6. *Slow Track*: Pegawai yang termasuk dalam kelompok *Slow Starter* dengan Kinerja Sedang dan Potensi Rendah dapat dipromosikan 5 (lima) tahun sejak menduduki *Person Grade* terakhir.

Konsep pengembangan karir Bank BTN disesuaikan dengan kebutuhan Bank, ketersediaan pegawai, *mapping* potensi dari *talent mapping*, pola pergerakan karir sesuai dengan risiko jabatan dan pergerakan jabatan. Hal ini untuk memastikan bahwa pengembangan karir pegawai juga sejalan dengan kebutuhan bisnis atau kebutuhan dalam pemenuhan transformasi/perubahan organisasi.

Untuk memastikan pemenuhan suksesor juga dilakukan program-program pengembangan karir untuk berbagai level jabatan. Untuk pelaksanaan program dilaksanakan dengan langkah-langkah mulai dari identifikasi dan seleksi kandidat, sampai dengan talent panel untuk menentukan pergerakan karir atau posisi kandidat dari hasil pelaksanaan program. Adapun jenis pengembangan yang dilakukan kepada pegawai yaitu meliputi pendidikan *leadership*, *immersion*, *coaching* dan *mentoring*, pemberian target spesifik, *project assignment*, pendidikan teknis, sertifikasi *mandatory*, penugasan mengajar/pemateri, sertifikasi. Selain itu juga dilakukan *executive coach*, rotasi/*replacement*, *company benchmark*, *join association* (asosiasi profesi perbankan), seminar/konferensi, dan *assignment* ke tim *ad-hoc* untuk menambah *exposure*, *experience* dan *network* dari pegawai.

Talent Acceleration Program (TAP)

Talent Acceleration Program (TAP) adalah program akselerasi pengembangan talent Perseroan sebagai feeder jabatan kritikal

di level BOD-1, BOD-2 dan/atau BOD-3. Adapun kriteria peserta TAP secara umum yaitu Pegawai dengan kinerja tinggi, memiliki potensi yang baik, memiliki integritas tinggi serta sudah menduduki jabatan tertentu. *Talent Acceleration Program* (TAP) juga merupakan upaya perseroan untuk mendorong para milenial yang eligible untuk menduduki jabatan-jabatan strategis yang dipersiapkan dengan berbagai program pengembangan untuk memastikan *readiness level* yang tinggi saat Pegawai ditugaskan pada suatu jabatan tertentu.

BTN Millennial Leader

BTN Millennial Leader merupakan program pengembangan guna meningkatkan kapasitas pegawai Bank BTN sesuai persyaratan jabatan serta sebagai bentuk persiapan menuju jenjang jabatan yang lebih tinggi. Program disesuaikan dengan sasaran kompetensi *Strategic Orientation*, *Aligning Performance for Success*, dan *Driving Execution* sehingga diharapkan mampu menghasilkan kinerja dan produktivitas secara efektif dan optimal.

Tujuan Program:

1. Mempersiapkan suksesor pemimpin Perusahaan yang kompeten, memiliki wawasan luas, dan menguasai bidang tugasnya.
2. Memberikan tambahan pembekalan berupa *soft competency* (mengacu pada Kompetensi Bank BTN).
3. Memperkuat kemampuan dalam memimpin sebuah team, *planning*, *organizing* dan membuat keputusan untuk peningkatan kinerja.

Know Your Employee (KYE)

Perseroan melaksanakan *Know Your Employee* (KYE) sesuai dengan ketentuan eksternal maupun internal. KYE dilakukan secara berkelanjutan dan menyeluruh dimana selama tahun 2023 juga dilakukan KYE sebagai upaya *early warning* untuk petunjuk atau indikasi akan adanya sesuatu yang tidak biasa dan memerlukan penyelidikan lebih lanjut. Dalam menjalankan KYE Perseroan menggunakan aplikasi KYE yang dikelola oleh Satuan Kerja *Human Capital*. Aplikasi KYE memiliki 7 (tujuh) parameter yang masing-masing memiliki skor untuk menghasilkan akumulasi nilai profil pegawai, di antaranya yaitu transaksi mencurigakan (*suspicious transaction*) dan pernikahan sesama pegawai. Adapun hasil atas profiling pegawai atas KYE yang dilakukan secara berkala selanjutnya ditindaklanjuti sesuai mekanisme internal dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pelaksanaan Pengembangan Karir

Adapun aktivitas dalam mendukung pengembangan karir pegawai adalah pelaksanaan *assessment* pegawai. Pelaksanaan *assessment* selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Assessment Tahun 2023

No.	Keterangan	Peserta
1.	<i>Assessment Grade 8 – 13 (ASTONIA)*</i>	1.040
2.	<i>Assessment Grade > 13 Menggunakan Jasa Konsultan</i>	345

*ASTONIA merupakan aplikasi internal Bank BTN untuk pelaksanaan asesmen pegawai.

Grade	Jumlah Peserta
8	2
9	290
10	155
11	583
12	238
13	295
14	200
15	108
16	59
17	28
18	22
19	11
20	12
TOTAL	2.003

Grade	TAP Batch 1	TAP Batch 2	BTN Millennial Leader
	Jumlah Peserta	Jumlah Peserta	Jumlah Peserta
13	-	-	3
14	1	3	18
15	16	40	-
16	34	23	-
17	23	6	-
18	3	-	-
TOTAL	77	72	21

3. Penilaian Kinerja yaitu proses evaluasi terhadap sasaran kinerja dan pencapaiannya.

Adapun komponen yang menjadi penilaian yaitu:

a. Penilaian Kinerja (Bobot 90%)

Merupakan penilaian berdasarkan *Key Performance Indicator* (KPI) dari jabatan pegawai. Adapun Penilaian kinerja terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu:

- Komponen *Key Performance Indicator* (KPI) *Cascading* yaitu KPI yang didapatkan dari hasil *cascading* (sesuai tanggung jawab dan peran dari individu tersebut) terhadap KPI dari *layer* di atasnya atau KPI unit kerjanya. Komponen ini mencerminkan kontribusi suatu individu terhadap keberhasilan Unit Kerja nya. Adapun jenis *cascading* adalah sebagai berikut:

<i>Fully Cascade</i>	: KPI Unit diturunkan sepenuhnya ke pegawai dengan target yang sama.
<i>Partially Cascade</i>	: KPI Unit diturunkan ke pegawai dengan target/segmen yang telah dibagi (sesuai tanggung jawab individu).
<i>Contributory Cascade</i>	: KPI Unit diturunkan ke pegawai dalam ukuran KPI lain yang dapat mendukung pencapaian KPI unit tersebut (sesuai peran pegawai).

- Komponen *Performance Indicator* (PI) yaitu ukuran keberhasilan dari pelaksanaan Uraian Pekerjaan (*Job description*) pegawai. Komponen ini mencerminkan kinerja individu secara berdasarkan *job desc* nya.

b. Penilaian Implementasi Budaya (Bobot 10%)

Merupakan penilaian dari atas langsung kepada pegawai berdasarkan penjabaran terhadap implementasi budaya perusahaan.

Finalisasi penilaian kinerja pegawai dilakukan oleh Komite Personalia di masing-masing unit kerja untuk selanjutnya disampaikan ke Human Capital Management Division sebagai dasar dalam penentuan remunerasi, pengembangan karir dalam sistem *Human Capital Information System* (HCIS).

Pelaksanaan Penilaian Kinerja

Proses penilaian kinerja untuk tahun kinerja 2023 saat ini masih berjalan dan atas hasil penilaian kinerja atas tahun 2022 yaitu sebagai berikut:

No	Kategori Nilai 2022	Jumlah Pegawai
1	Istimewa	2.587
2	Sangat Baik	4.172
3	Baik	3.895
4	Cukup	129
5	Kurang	27
Jumlah Pegawai Tetap		10.810
Calon Pegawai		1.048
TOTAL		11.858

Remunerasi

Dalam pemberian remunerasi, di tahun 2023 telah diterbitkan ketentuan baru yang menyempurnakan ketentuan sebelumnya yaitu dengan diterbitkannya Kebijakan Khusus (KK) No.3-B tanggal 31 Oktober 2023 tentang Remunerasi. Pengelolaan Sumber Daya Manusia atau *Human Capital* menjadi salah satu prioritas terpenting dalam menjalankan roda Perseroan. Remunerasi pegawai merupakan suatu sistem penggajian dan kompensasi yang diterapkan Perseroan untuk memberi imbalan kepada Pegawai berdasarkan sejumlah faktor.

Adapun cakupan sistem remunerasi tersebut antara lain tata kelola dalam pemberian remunerasi, kompensasi, *benefit*, kompensasi *benefit* berdasarkan peraturan Perundang-Undangan dan penghargaan. Penerapan tata kelola dalam pemberian remunerasi bertujuan untuk mendorong dilakukannya *prudential banking* yaitu pengambilan risiko dalam melakukan kegiatan usaha dilakukan secara terukur dan mengacu pada ketentuan perundang-undangan mengenai manajemen risiko sehingga pengambilan risiko yang berlebihan (*excessive risk taking*) oleh

pengambil keputusan dapat dihindari dan kelangsungan usaha serta kesehatan Perseroan dapat terjaga.

Kebijakan remunerasi yang disusun wajib paling sedikit mempertimbangkan:

1. Terciptanya manajemen risiko yang efektif
2. Stabilitas keuangan Perseroan
3. Kecukupan dan penguatan permodalan Perseroan
4. Kebutuhan likuiditas jangka pendek dan jangka panjang
5. Potensi pendapatan di masa yang akan datang.

Pelaksanaan Remunerasi

Perseroan memberikan remunerasi kepada pegawai dengan menerapkan *performance based reward*. Dengan demikian, semakin tinggi kinerja pegawai, maka semakin tinggi remunerasi yang didapatkan pegawai. Perseroan juga menerapkan gender inclusion dalam remunerasi, sehingga tidak ada perbedaan remunerasi antara pegawai pria dan wanita.

Total Remunerasi Per Gender (Per Grade)

Jabatan	Pria		Wanita		Total	
	Jumlah Pegawai	Jumlah Remunerasi (Juta)	Jumlah Pegawai	Jumlah Remunerasi (Juta)	Jumlah Pegawai	Jumlah Remunerasi (Juta)
Level 22	2	6.769.489.498	-	-	2	6.769.489.498
Level 19-21	134	293.332.224.111	24	51.938.585.850	158	345.270.809.961
Level 15-18	1.061	816.732.616.447	376	253.623.332.898	1.437	1.070.355.949.345
Level 13-14	1.762	484.594.930.203	1.149	287.609.927.513	2.911	772.204.857.716
Level 11-12	2.574	417.034.592.176	3.129	475.149.713.347	5.703	892.184.305.523
Level 8-10	755	97.894.669.648	1.079	138.984.748.782	1.834	236.879.418.430
Jumlah	6.288	2.116.358.522.083	5.757	1.207.306.308.390	12.045	3.323.664.830.473

Keterangan: Jumlah pegawai merupakan pegawai tetap dan kontrak

Program Pensiun

Kebijakan

Program Pensiun Bank BTN terbagi menjadi dua program, yaitu Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) yang dikelola oleh Dana Pensiun Bank BTN, serta Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) yang dikelola oleh DPLK pihak ketiga. Program PPMP merupakan program untuk pegawai yang masuk Bank BTN sebelum tahun 2004, sedangkan setelah tahun 2004 maka pegawai akan otomatis masuk dalam program PPMP.

Pada Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP), pegawai tetap mendapatkan manfaat sebesar formula yang sudah ditentukan oleh Dana Pensiun dengan jumlah Manfaat Pensiun yang dapat diterima pegawai setinggi-tingginya 80% dari Penghasilan Dasar Pensiun mengacu kepada Ketetapan Direksi yang mengatur tentang Peraturan Dana Pensiun PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (Dapen BTN), sedangkan pada Program Iuran Pasti, pegawai tetap mendapatkan manfaat pensiun dari akumulasi saldo iuran sebesar 2,5% dari gaji yang bersangkutan dan 7,5% dari Perseroan serta hasil pengembangannya.

PROGRAM PERSIAPAN PENSIUN

Perseroan memberikan perhatian atas kesejahteraan pegawai menjelang pensiun melalui Program Persiapan Pensiun. Program tersebut diperuntukan bagi pegawai tetap yang telah mencapai usia 55 Tahun. Program Persiapan Pensiun dirancang untuk membantu Pegawai dalam mempersiapkan diri secara finansial, mental dan fisik untuk menghadapi masa pensiun, sehingga

Pegawai dapat menikmati kehidupan yang nyaman dan tenang setelah Pensiun.

Adapun pelaksanaan program persiapan pensiun adalah sebagai berikut:

1. Program Pelatihan, yaitu program pembekalan berupa pelatihan keterampilan dengan materi/bidang yang sesuai dengan bakat/keinginan Pegawai yang bersangkutan diantaranya: *Financial Management Training, Job Searching Training, Entrepreneurship Training*,
2. Program Kesempatan Karir, yaitu diberikan kesempatan untuk memberikan bantuan jasa kepada Bank, Anak Perusahaan dan/atau Perusahaan Terafiliasi Bank. Adapun bentuk bantuan jasa yang dimaksud adalah sebagai trainer ataupun *Advisor*
3. Program Pendampingan, yaitu pemberian *counselling* yang bertujuan untuk dapat mempersiapkan Pegawai menghadapi kehidupan setelah pensiun, dan pemberian *Coaching* terkait mengembangkan kewirausahaan (*entrepreneurship*) dan *job searching*.

Selain program persiapan pensiun tersebut, Perseroan juga memberikan opsi bagi pegawai yang berusia 55 tahun untuk dapat mengambil Masa Persiapan Pensiun (MPP) yaitu dibebastugaskan dari pekerjaan sehari-hari yang tujuannya agar Pegawai memiliki waktu lebih panjang untuk mempersiapkan fisik dan mental guna menghadapi Pensiun.

Pelaksanaan Program Pensiun

Pelaksanaan program pensiun merupakan bentuk apresiasi kepada pegawai tetap atas kontribusinya di Perseroan. Pegawai tetap yang telah mencapai usia pensiun normal yaitu 56 tahun dan pegawai tetap dengan Status *Teller Staff, Customer Service*

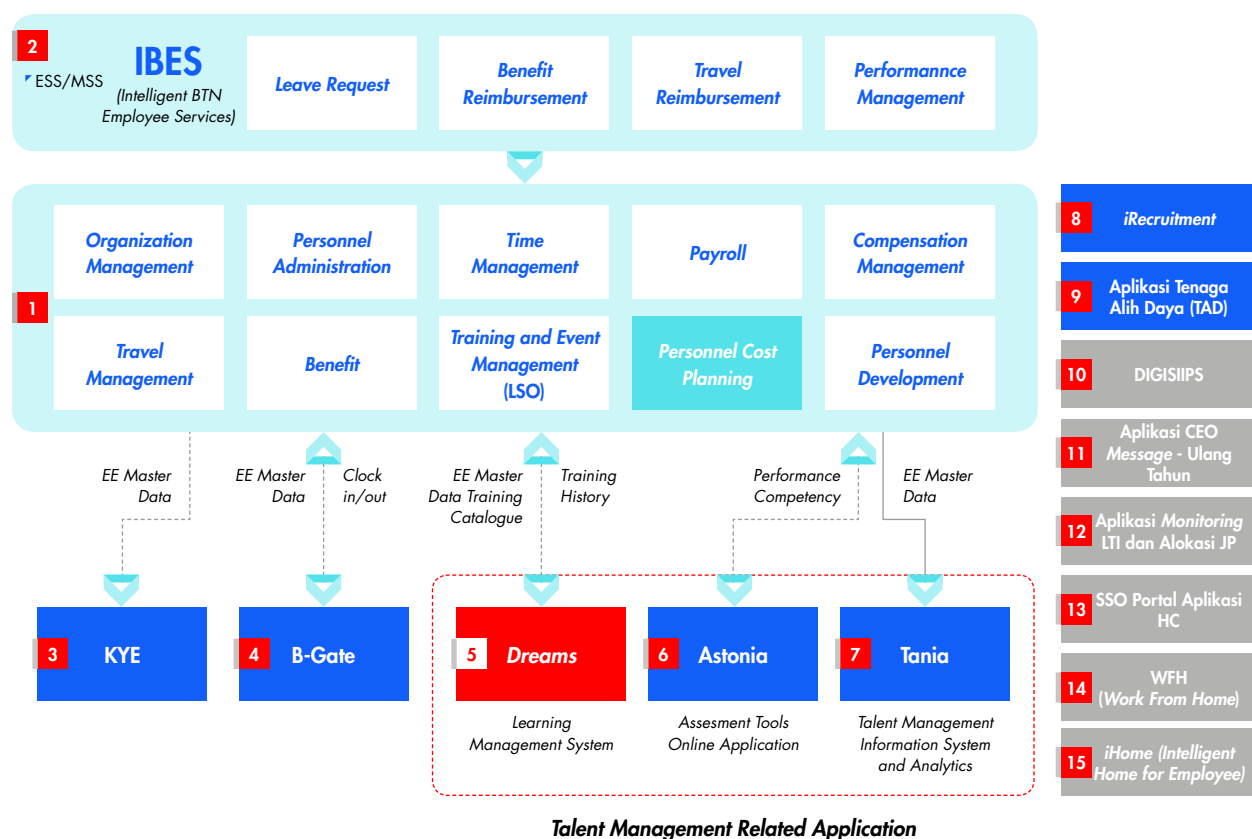
Staff dan sekretaris yang berusia 36 tahun berhak mendapatkan manfaat pensiun. Per tahun 2023 terdapat 28 pegawai yang menjalani Masa Persiapan Pensiun (MPP).

Human Capital Information System (HCIS) —

Pengelolaan *Human Capital* perusahaan didukung dengan pengembangan *information technology* (IT) yang memadai untuk memastikan proses operasional dalam pengelolaan siklus *Human Capital* serta pemenuhan hak-hak pegawai dapat berjalan dengan baik di antaranya sebagai berikut:

1. Adanya mekanisme *monitoring* secara keseluruhan dari keselarasan visi misi dan berbagai tata kelola, yaitu akses, security, dan juga kepatuhan.
2. Perlunya memastikan keselarasan *landscape* sistem SDM dengan keseluruhan strategi SDM.
3. Mengurangi tingkat manual data *intervention* kepegawaian ke sistem internal lain di perusahaan.
4. Memastikan tercapainya *operational excellence* pada fungsi SDM dan kualitas layanan sistem SDM yang merata sampai unit kerja terkecil di seluruh daerah operasional perusahaan.
5. Implementasi keseluruhan *cycle* manajemen talenta secara sistematis.
6. Ketersediaan *insight* keseluruhan proses SDM untuk mendukung pengambilan keputusan bagi manajemen.

Secara garis besar *framework* IT *Human Capital* dapat digambarkan dalam bagan berikut:



Sebagai upaya penyempurnaan dalam teknologi pengelolaan *Human Capital* yang termasuk dalam inisiatif strategis *Human Capital* sampai dengan tahun 2025, di tahun 2023 telah dimulai proses transformasi HC *Technology* dengan mengembangkan *Human Capital Information System* (HCIS) berbasis *cloud*. Pengembangan HCIS berbasis *cloud* dilakukan untuk seluruh siklus pengelolaan *Human Capital* dan dikembangkan dalam 3 (tiga) fase dari tahun 2023 sampai dengan 2025. Transformasi ini juga untuk mendukung implementasi *people analytic* pengelolaan HC dengan mengoptimalkan peran teknologi.

Internalisasi Budaya —

Implementasi Program Budaya Perusahaan tahun 2023 merupakan penyempurnaan program yang selama ini telah dijalankan. Setiap program tetap dilakukan dan dilaporkan kepada tim *Culture Specialist* setiap bulannya dengan mengacu pada 4 (empat) pilar Budaya Perusahaan Bank BTN. Program tahun ini, difokuskan pada penyusunan program yang dilakukan oleh masing-masing unit kerja sesuai dengan kebutuhan dan fokus pada *Key Performance Indicator* (KPI) serta perubahan perilaku yang diharapkan Perseroan yang sejalan dengan AKHLAK *Culture Journey* (ACJ) berdasarkan SK Menteri BUMN. Setiap pilar akan diberikan tema program sebagai *guidance* setiap unit kerja dalam menjalankan programnya.

Tahun 2023 setiap unit kerja wajib melaksanakan seluruh pilar, penerapan program budaya akan terbagi menjadi 2 (dua) kategori program, yaitu:

1. Program Utama; yaitu program budaya perusahaan yang WAJIB dilaksanakan oleh setiap unit kerja sesuai dengan 4 (empat) Pilar Budaya Perusahaan.
2. Program Pilihan; yaitu program budaya perusahaan yang menjadi PILIHAN unit kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan unit kerja.

Penjelasan mengenai kedua program tersebut adalah sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut:

Kategori Program	Aktivitas Program	Monitoring
Program Utama	- Aktivitas program disusun oleh Change Agent Team dan BTNers di masing-masing Unit Kerja sesuai dengan tema yang telah ditentukan oleh Tim Culture Specialist. - Wajib dilaksanakan oleh setiap unit kerja sesuai dengan klasifikasi unit kerja (Kantor Cabang/Kantor Wilayah/Kantor Pusat). - Meliputi 4 (empat) tema program budaya, yaitu <i>Sales</i> dan <i>Service Culture</i>, <i>Governance</i>, <i>Risk</i>, dan <i>Compliance Culture</i>, <i>Performance Culture</i> dan <i>Learning Culture</i>. - Masing-masing tema memiliki satu/dua program budaya perusahaan sesuai dengan klasifikasi unit kerja.	- Setiap bulan akan disampaikan perolehan skor sesuai dengan laporan yang disampaikan kepada tim Culture Specialist. - Dilakukan secara konsultatif oleh Tim Culture Specialist. - Unit kerja yang menjadi <i>top 5</i> maka dapat menjadi <i>coaching buddy</i> kepada unit kerja yang berada di <i>bottom 5</i> di masing-masing wilayah.
Program Pilihan	- Aktivitas program ditentukan oleh masing-masing unit kerja yang masih selaras dengan 4 (empat) pilar Budaya Perusahaan. - Setiap unit kerja wajib menyusun 1 (satu) program pilihan sesuai dengan kebutuhan unit kerja.	Pelaksanaan <i>monitoring</i> untuk program pilihan selaras dengan program utama.

Pelaksanaan program Budaya Perusahaan Bank BTN tahun 2023 – 2024 diarahkan untuk mendukung pencapaian target bisnis unit kerja sehingga setiap programnya adalah aktivitas yang dapat mendorong kinerja unit kerja baik dari sisi bisnis maupun *support*. Pelaksanaan program unit kerja dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya, mengingat program disusun secara mandiri oleh masing-masing unit kerja maka diharapkan agar seluruh BTNers pada setiap unit kerja di Kantor Cabang,

Kantor Wilayah dan Kantor Pusat dapat menjalankan aktivitas Program Budaya Perusahaan Tahun 2023 – 2024.

Dalam melaksanakan program Budaya Perusahaan terdapat acuan tema untuk setiap pilarnya. *Guidance* ini adalah sebagai gambaran untuk menyusun program untuk setiap unit kerja.

Tema 4 (pilar) Budaya Perusahaan 2023


Berikut merupakan tabel rincian aktivitas Program Budaya Perusahaan Tahun 2023 – 2024:

Tema	Program	Kantor Cabang	Kantor Wilayah	Kantor Pusat
Sales & Service Culture	<i>Sales Effectiveness</i>	Ya	Ya	Ya (divisi Bisnis)
	<i>Service Excellence</i>	Ya	Ya	Ya
Governance & Risk Culture	<i>Zona Integritas - Risk</i>	Ya	Ya	Ya
	<i>Zona Integritas - Governance</i>	Ya	Ya	Ya
Performance Culture	<i>Performance Review</i>	Ya	Ya	Ya
Learning Culture	<i>Learning, Sharing & Doing</i>	Ya	Ya	Ya
Program Pilihan	(diserahkan kepada masing-masing Unit Kerja)	Ya	Ya	Ya

Total program yang dijalankan oleh seluruh unit kerja adalah 7 (tujuh) program atau 6 (enam) program untuk Divisi *Support/Shared*. Sasaran yang dicapai dalam program Budaya Perusahaan bukan hanya selaras dengan target Perseroan tetapi

juga menyasar perubahan perilaku yang harus dimiliki oleh seluruh pegawai melalui 8 (delapan) Perilaku Utama BTNers dengan 3 (tiga) *Critical Few Behaviours* sebagai fokus utama perubahan perilaku pada tahun 2023.

8 Perilaku Utama BTNers & 3 *Critical Few Behaviours*

1



Berpegang teguh dan patuh pada nilai moral dan etika bisnis, memenuhi komitmen sesuai peraturan yang berlaku

2



Terus belajar, melakukan perbaikan *intrapreneurship* untuk meningkatkan kompetensi diri dan orang lain

3



Disiplin, konsisten dan tuntas dalam menyelesaikan tugas dengan kualitas hasil terbaik

4



Saling menghormati, menghargai dan terbuka terhadap perbedaan

5



Bertanggung jawab dan selalu mengedepankan kepentingan perusahaan

6



Proaktif, efektif, dan efisien dalam memenuhi kebutuhan pelanggan

7



Cepat tanggap terhadap perubahan serta memberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan yang berkelanjutan

8



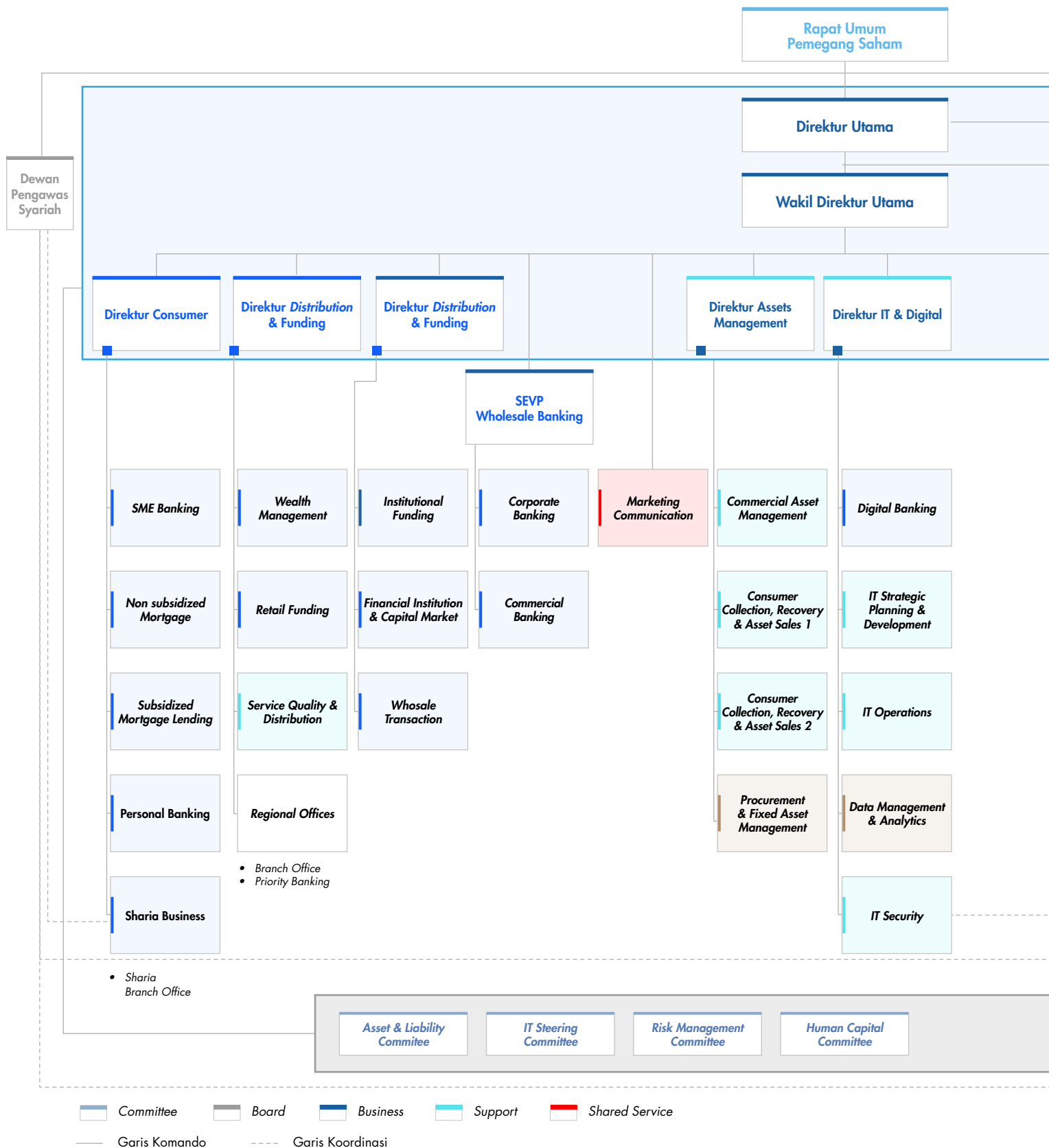
Terbuka untuk bekerja sama yang menghasilkan nilai tambah

Critical Few Behaviours

Seluruh program yang dilaksanakan oleh Unit Kerja akan disampaikan kepada tim *Culture Specialist* melalui aplikasi DIGISIIPS sehingga seluruh proses yang dilaporkan sudah *paperless* dan *digitalize*.

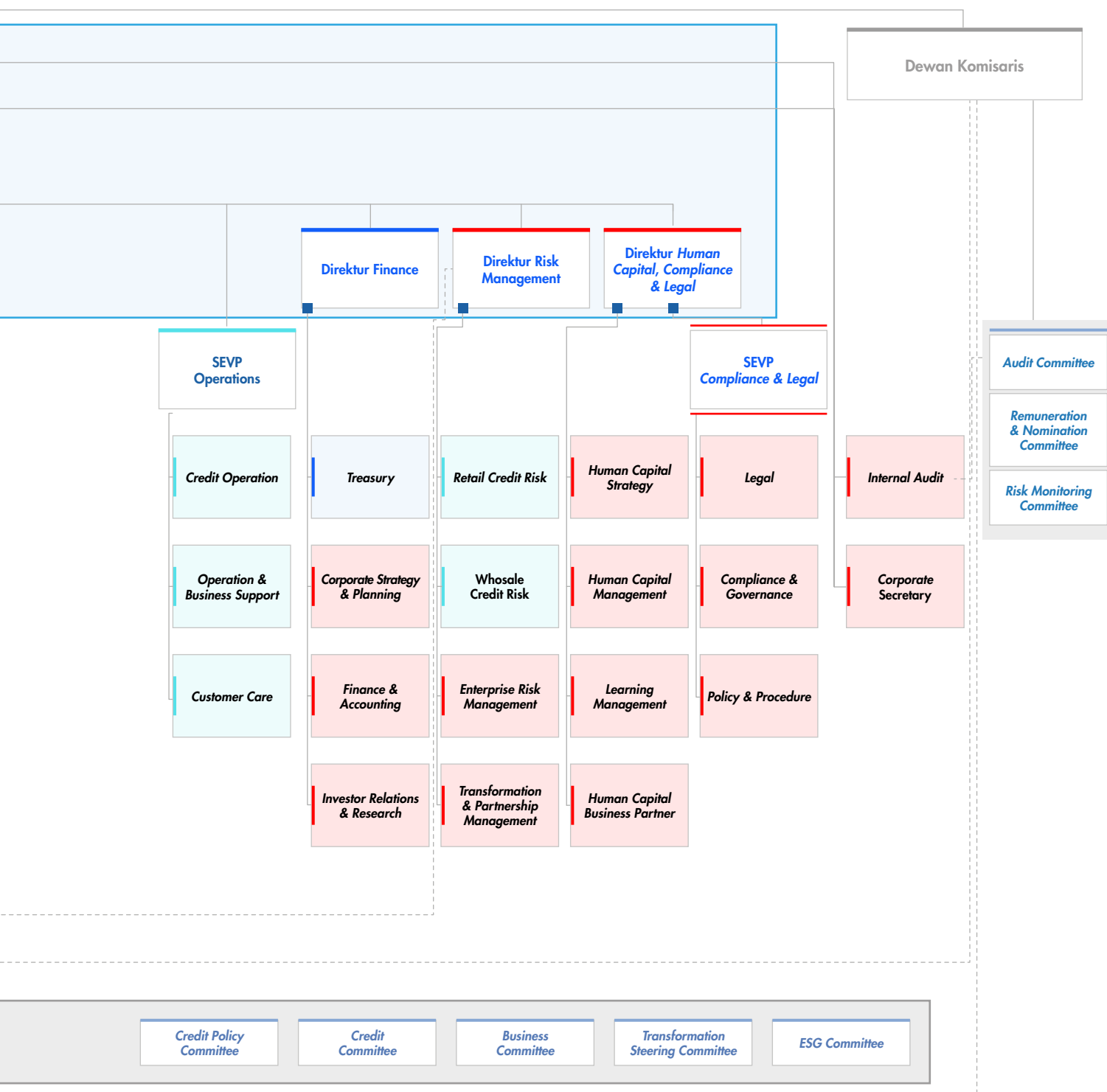


Struktur Pengelola Human Capital



Pengelolaan *Human Capital* perusahaan terus dikembangkan untuk memastikan bahwa kebijakan, proses, prosedur serta teknologi yang digunakan merupakan yang terbaik menurut *best practice*. Organisasi pengelolaan *Human Capital* perusahaan dikelola oleh 4 (empat) Divisi yaitu Human Capital Strategy Division (HCSD), Human Capital Management Division (HCMD), Human Capital Business Partner Division (HCBD) dan Learning Management Division (LMD) di bawah kepemimpinan Direktur Human Capital, Compliance & Legal.

Struktur Organisasi Pengelolaan Human Capital



6. Indikator Pengembangan Talenta dengan meningkatkan Rasio Perempuan dalam *Nominated Talent* Rasio Millennial dalam *Nominated Talent*.
7. Perbaikan tata kelola remunerasi BOD dan BOC.
8. Implementasi *Respectful Workplace Policy* (RWP).
9. Menindaklanjuti dengan perbaikan atas hasil dari *HC Maturity Assessment*.
10. Praktik bisnis yang berkelanjutan yaitu dengan menyeimbangkan antara kepentingan perusahaan dengan kesejahteraan pegawai.
11. Menjalankan AKHLAK Culture Journey sebagaimana sesuai SK Menteri BUMN No. SK-115/MBU/05/2022.

Dalam rangka meningkatkan kompetensi pegawai di tahun 2024 dilaksanakan pula Program Kerja *Learning Management* 2024 dengan 5 (lima) fokus yaitu:

- a. Mengembangkan Kompetensi untuk Peningkatan Produktivitas
 - Pengembangan kapabilitas pegawai dalam meningkatkan portofolio Kredit *High Yield*, DPK Transaksional dan Ritel serta perbaikan Kualitas Kredit.
 - Pengembangan kapabilitas IT dan Digital dalam rangka mendukung implementasi strategi *Digital Banking* dan *People Analytic*.
- b. Meningkatkan kapabilitas kepemimpinan dan *future skill* yaitu terkait dengan Program pengembangan kepemimpinan yang disesuaikan dengan rencana suksesi dan *future skill*.

- c. Kepatuhan terhadap sertifikasi regulasi yaitu dengan memastikan seluruh kompetensi *mandatory* beserta sertifikasinya terlaksana dengan baik, di antaranya yaitu pemenuhan sertifikasi kepada pegawai yang dipersyaratkan antara lain Sertifikasi Manajemen Risiko, SPPUR, Kepatuhan, WAPERD, Treasury, WPPE-P dan pegawai bidang *lending*.
- d. Peningkatan Budaya Pembelajaran dengan mengembangkan budaya *self learning*, *Community of Practice*, *Project Assignment*, serta *Coaching/Mentoring*.
- e. Penguatan Organisasi dan Infrastruktur Learning di antaranya dengan penyempurnaan struktur organisasi Learning Management Division, mengintegrasikan Learning Management System (LMS) dan Knowledge Management System (KMS) serta mengembangkan konten *learning* melalui kerjasama dengan learning provider.

Selain itu, dalam mengelola ilmu dan pengetahuan yang dimiliki oleh *Subject Matter Expert* (SME), Perseroan akan melakukan *self assessment* terhadap manajemen pengetahuan / *knowledge management* dan kedepannya akan mengimplementasikan ISO 30401:2018 tentang manajemen pengetahuan.

Dalam memastikan bahwa Human Capital merupakan mitra strategis dari bisnis Perseroan, Human Capital juga terus memperkuat peran dari Human Capital Business Partner Division (HCBP) serta memastikan program kerja Divisi Human Capital Business Partner Division (HCBP) untuk mendukung kebutuhan bisnis dalam bentuk pemenuhan pegawai, pemenuhan kompetensi maupun lainnya.





TEKNOLOGI INFORMASI



“

Perseroan secara berkala melakukan inovasi teknologi informasi untuk mendukung bisnis Perseroan. Beberapa inovasi teknologi informasi yang dilakukan pada tahun 2023 antara lain: *Online Onboarding (OLOB)* e-KYC, *HC Cloud*, dan *Internet Banking Business (IBB)*.

Strategi Teknologi Informasi

Teknologi informasi (TI) memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung bisnis Perseroan. Untuk itu, dilakukan penyusunan Rencana Strategis Teknologi Informasi (RSTI) tahun 2021 - 2025 yang dijadikan acuan dalam pengembangan inisiatif Teknologi Informasi (TI) maupun pemenuhan infrastruktur dan keamanan Teknologi Informasi (TI). Penyusunan Rencana Strategi Teknologi Informasi (RSTI) tahun 2021 - 2025 Perseroan didukung oleh 4 (empat) pilar utama, yaitu:

1. Business Aligned IT Strategy

Menyelaraskan kebutuhan bisnis agar penyusunan Rencana Strategis Teknologi Informasi (RSTI) tahun 2021 - 2025 dapat mendukung pencapaian visi Perseroan Menjadi *The Best Mortgage Bank in Southeast Asia* pada tahun 2025.

2. Enterprise Architecture

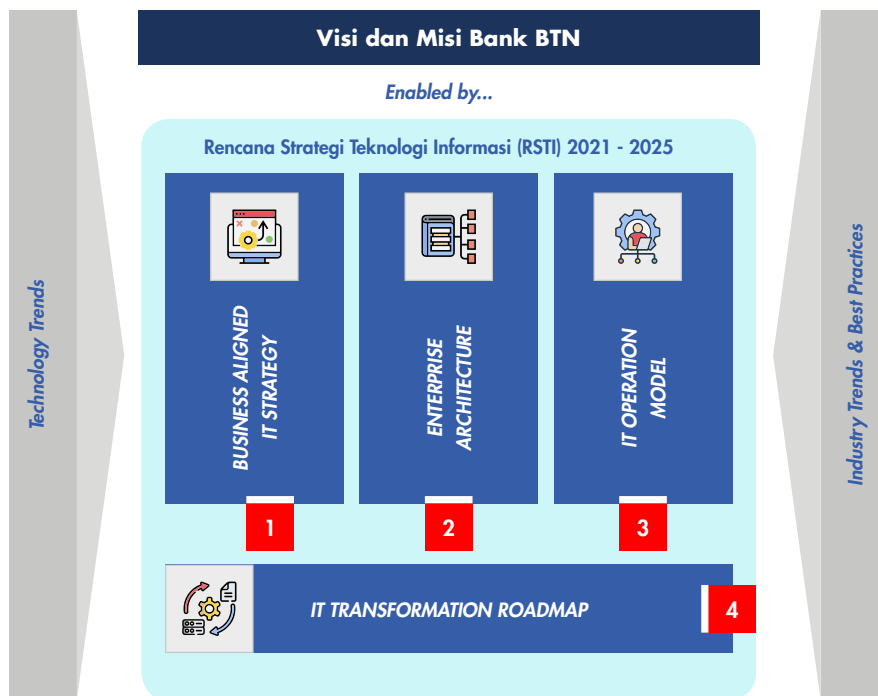
Mendesain *technology stack* yang modular, terbuka, dan *scalable* untuk membantu strategi digitalisasi bisnis dan produk.

3. IT Operating Model

Meningkatkan model operasi teknologi *multi-speed* dan pendekatan *sourcing* yang strategis untuk membantu mendukung digitalisasi di masa depan.

4. IT Transformation Roadmap

Sebuah *roadmap* yang terintegrasi dengan SDM, proses dan teknologi untuk memenuhi kebutuhan bisnis.



1. Business Aligned IT Strategy

Penyusunan Rencana Strategi Teknologi Informasi (RSTI) tahun 2021-2025 dilakukan dengan mempertimbangkan keselarasan *corporate strategy* serta aspirasi bisnis, dengan demikian pengembangan di sisi Teknologi Informasi (TI) akan sejalan dan mendukung perkembangan bisnis Perseroan. Telah ditetapkan 6 (enam) tema teknologi utama untuk mencapai visi Perseroan yaitu:

- End to end housing ecosystem digitalization**
Mendukung bisnis Perseroan dari hulu ke hilir di masa depan.
- Digitized Operations**
Meningkatkan proses bisnis Perseroan melalui digitalisasi teknologi antara lain seperti penggunaan *robotic* atau *tools*.

- Data-driven Bank**
Memfaatkan penggunaan dan pengolahan data yang akurat dan berkualitas untuk meningkatkan layanan.
- Flexible Multi-Speed IT**
Melakukan pengembangan dan implementasi Teknologi Informasi (TI) secara cepat dan berkualitas, sehingga dapat beradaptasi atas perubahan yang terjadi.
- Elastic & Resilient Infrastructure**
Melakukan integrasi sistem, agregasi antar sistem dan memberikan akses yang mudah untuk mencapai tingkat efektivitas yang lebih baik.
- Security by Design**
Menyediakan sebuah layanan perbankan yang aman bagi para nasabah.

2. Enterprise Architecture

Perseroan telah menyusun *Enterprise Architecture* untuk membantu strategi digitalisasi bisnis dan produk. *Enterprise Architecture* memberikan gambaran mengenai teknologi dan sistem yang digunakan oleh Perseroan untuk mencapai visi Perseroan dan strategi bisnis yang telah direncanakan. Terdapat 10 (sepuluh) domain pada *Enterprise Architecture* Perseroan sebagai berikut:

- a. *Ecosystem Management*
Pengelolaan hubungan yang berkelanjutan dan saling menguntungkan antara peserta ekosistem untuk menghasilkan nilai ekonomi dan manfaat sosial.
- b. *Channels*
Assisted and self-service channels dengan pengalaman pelanggan *omni-channel* yang saling berhubungan.
- c. *Sales & Marketing*
Mendukung kegiatan pemasaran, distribusi dan penjualan di dalam Perseroan.
- d. *Common Customer View*
Berkfungsi untuk memberikan pandangan dan pengelolaan yang komprehensif terhadap nasabah Perseroan.
- e. *Product Processing*
Layanan pemrosesan, administrasi dan transaksi produk di Perseroan.
- f. *Common Services*
Layanan pemrosesan yang umum ke seluruh produk Perseroan.
- g. *Technology Tools*
Enterprise-wide technologies yang mendukung operasi Perseroan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi.
- h. *Insight & Information*
Enterprise-wide tools untuk konsolidasi data dan pembuatan informasi untuk keperluan Perseroan.
- i. *Interface and Integrations*
Mengelola dan memantau integrasi secara dinamis baik internal Perseroan maupun eksternal.
- j. *Infrastructure & Security*
Infrastruktur yang aman dan dapat diandalkan untuk memenuhi kebutuhan bisnis.

3. IT Operating Model

Pada tahun 2023, Perseroan memiliki nilai *IT Maturity Level* sebesar 3,30 yang diukur dengan menggunakan COBIT 2019. Hal ini mencerminkan bahwa proses-proses operasional Teknologi Informasi (TI) telah terdefinisikan dan terkelola dengan baik. Perseroan juga telah melakukan *improvement* pada IT

Operating Model untuk mendukung strategis bisnis Perseroan pada tahun 2023, antara lain:

- a. Pemenuhan sumber daya manusia dengan melakukan rekrutmen ODP IT maupun *experience hired*.
- b. Pelaksanaan pelatihan Teknologi Informasi (TI) untuk meningkatkan kapabilitas SDM.
- c. Pelaksanaan *review* Kebijakan Teknologi Informasi (TI).

Selain itu, Perseroan akan melakukan perbaikan dari sisi proses, *technology*, *governance* dan *organization* guna menjawab tantangan utama layanan Teknologi Informasi (TI) antara lain sebagai berikut.

- a. Implementasi *tools security* untuk optimalisasi proses pengamanan Teknologi Informasi (TI).
- b. Implementasi *PMO Tools* untuk optimalisasi proses operasional Teknologi Informasi (TI).

4. IT Transformation Roadmap

Perseroan telah menyusun *IT Transformation Roadmap* berdasarkan 6 (enam) tema teknologi yang telah ditetapkan guna mencapai visi Perseroan. Pada tahun 2023, Perseroan telah melakukan pengembangan sistem (i.e. *digital channel*) *agile based*. Sesuai dengan *IT Transformation Roadmap* yang telah disusun, Perseroan akan melanjutkan *continuous improvement* pada tahun 2024 - 2025 dengan berfokus pada peningkatan terhadap sistem-sistem non kritis dan perbaikan proses untuk meningkatkan *IT Maturity Level*.

Hasil Evaluasi atas Pelaksanaan Rencana Strategi Teknologi Informasi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara Pasal 210 Ayat 1 poin b, Perseroan memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi hasil evaluasi Rencana Strategi Teknologi Informasi (RSTI) tahun 2021 - 2025 yang menjadi bagian dari Laporan Tahunan. Dalam hal ini, Bank telah melakukan evaluasi Rencana Strategi Teknologi Informasi (RSTI) tahun 2021 - 2025 untuk posisi tahun 2023 dengan ruang lingkup IT *initiative*. Proses evaluasi Rencana Strategi Teknologi Informasi (RSTI) tahun 2021 - 2025 untuk posisi tahun 2023 tersebut, mengacu pada dokumen Rencana Strategi Teknologi Informasi (RSTI) tahun 2021 - 2025. Adapun status *progress* untuk posisi tahun 2023 sebesar 79,11%.

Inovasi Teknologi Informasi

Perseroan secara berkala melakukan inovasi Teknologi Informasi (TI) untuk mendukung bisnis Perseroan. Beberapa inovasi Teknologi Informasi (TI) yang dilakukan pada tahun 2023 antara lain:

1. Online Onboarding (OLOB) e-KYC

Merupakan fitur yang berfungsi untuk memverifikasi data calon nasabah.

2. HC Cloud

Merupakan sistem terintegrasi untuk pengelolaan informasi pegawai Perseroan seperti remunerasi, gaji dan lain sebagainya.

3. Internet Banking Business (IBB)

Merupakan aplikasi transaksional yang digunakan untuk membantu nasabah korporat dalam melakukan transaksi melalui *internet banking*.

Infrastruktur Teknologi Informasi —

Adanya tuntutan kebutuhan akan teknologi serta peningkatan transaksi dan layanan digital Perseroan, membuat organisasi harus cepat merespon perubahan-perubahan yang terjadi, pesatnya perkembangan Teknologi Informasi (TI) membuat organisasi harus cepat beradaptasi. Salah satunya terkait dengan infrastruktur yang merupakan pondasi dari sebuah organisasi dan mencakup keseluruhan layanan, oleh karena itu dibutuhkan infrastruktur Teknologi Informasi (TI) yang handal.

Selama tahun 2023, Perseroan memiliki beberapa fokus untuk meningkatkan IT *service excellence*, hal tersebut dilakukan guna menjaga keberlangsungan usaha dan keamanan informasi Perseroan secara berkelanjutan. Salah satu strategi yang dilakukan oleh Perseroan adalah melakukan *improvement* dan penguatan dari sisi infrastruktur secara berkesinambungan dari tahun ke tahun antara lain:

1. Penguatan IT Monitoring

Melakukan pemantauan secara proaktif dan terintegrasi dengan adanya *early warning* untuk mengetahui potensi permasalahan sebelum terjadi kendala. IT Monitoring juga berfungsi untuk mengumpulkan data dan informasi serta memantau *availability* dan utilisasi dari server aplikasi, database dan network, menyediakan data secara *real time* yang dapat diolah dan dianalisis untuk keseluruhan kinerja sistem dalam satu *dashboard*. Selain itu, IT Operation juga telah menyelesaikan pembangunan ruang *integrated monitoring* agar lebih fokus dalam kegiatan IT Monitoring serta memudahkan koordinasi antar tim. Aktivitas IT Monitoring yang dilakukan adalah monitoring semua *dashboard* selama 24/7 yang terdiri dari *dashboard server aplikasi*, *dashboard server database*, dan *dashboard network*. Tools yang digunakan pada IT Monitoring:

- General Monitoring.
- Network Monitoring.
- Application Performance Monitoring.
- Security Monitoring.

2. Implementasi Standarisasi

Implementasi standarisasi di Kantor Cabang, hal ini merupakan salah satu *improvement* untuk melakukan percepatan proses bisnis serta menjaga *availability* dan *reliability* layanan Teknologi Informasi (TI) sehingga dapat mendukung kinerja layanan Kantor Cabang yang lebih optimal.

- Standarisasi Infrastruktur di Kantor Cabang.
- Standarisasi Network di Kantor Cabang, selain sebagai pemenuhan aspek *security* terkait keamanan data, hal

ini juga bertujuan untuk menjaga agar jaringan lebih stabil, dapat dimonitor penggunaannya dan nasabah mendapatkan pengalaman yang sama di setiap cabang milik Perseroan.

3. Backup Management System

Pertumbuhan data yang semakin meningkat dan *trend* akses data secara *online* membuat organisasi harus mempunyai sistem *backup* yang mumpuni. Menjaga dan melindungi data menjadi *concern* utama organisasi sehingga IT Operation telah mengimplementasikan sistem *backup* dan *recovery* untuk menunjang *business continuity*. Aktivitas *backup* dilakukan rutin baik harian, bulanan dan tahunan secara *onsite* maupun *offsite*.

4. Modernisasi Infrastruktur

Melakukan *upgrade* teknologi yang terbaru serta penambahan kapasitas untuk mendukung pertumbuhan operasional di antaranya:

- Modernisasi virtualisasi, *upgrade* versi infrastruktur virtualisasi untuk beradaptasi dengan kebutuhan Teknologi Informasi (TI) saat ini.
- Melakukan penambahan kapasitas infrastruktur baremetal dan virtualisasi dalam menjaga *availability* dan *reliability* Infrastruktur Teknologi Informasi (TI).
- Branch Infrastructure Monitoring platform, informasi yang selalu *update* secara *real time* menjadi acuan untuk mengambil keputusan yang dapat mendukung kebutuhan Teknologi Informasi (TI) di outlet milik Perseroan.

Pada tahun 2023, Perseroan juga fokus pada upaya meningkatkan *elastic and resilient infrastructure*, hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan ketahanan dan kemampuan untuk bangkit dan pulih apabila terjadi gangguan atau *disaster*, inisiatif yang dijalankan di antaranya:

- Cloud journey, melakukan *cloud readiness assessment*, strategi dan arsitektur *cloud* yang akan diterapkan, *platform & security* dan *operational integration*. Melakukan perubahan pada IT Operating Model (mendukung *agile delivery* dan menyediakan *continuous delivery* terhadap perubahan fitur dan proses bisnis).
- Implementasi teknologi *cloud computing*.
- Rutin melakukan uji coba kesiapan *data center* untuk aplikasi-aplikasi *critical* maupun *non critical* secara berkala.
- Melakukan DC *assessment* untuk menelaah kondisi arsitektur Teknologi Informasi (TI) secara komprehensif dan mendapatkan strategi *road map* untuk mendapatkan infrastruktur Teknologi Informasi (TI) yang *elastic* dan *resilient*.

Tata Kelola Teknologi Informasi —

Perseroan memiliki tata kelola dan teknologi yang mengikuti perkembangan jaman untuk membantu optimalisasi proses operasional bisnis. Selain itu, Perseroan juga memiliki infrastruktur Teknologi Informasi (TI), keamanan Teknologi Informasi (TI) dan sumber daya yang memadai. Hal ini tercermin dari hasil asesmen *IT Maturity Level* yang telah dilakukan berdasarkan COBIT 2019 dengan nilai sebesar 3,30. Nilai tersebut mencerminkan bahwa proses-proses operasional Teknologi Informasi (TI) telah terdefinisi dan terkelola dengan baik. Direksi dan Dewan Komisaris membangun kerangka kerja untuk governansi teknologi informasi (TI) Perseroan yang selaras dengan kebutuhan dan prioritas bisnis Perseroan, mendorong peluang dan kinerja bisnis, memperkuat manajemen risiko, serta mendukung tujuan dan strategi Perseroan.

Disruption

Dalam menghadapi era perkembangan Teknologi Informasi (TI) yang semakin pesat saat ini, Perseroan telah melakukan langkah dalam menghadapi tantangan disrupsi teknologi. Adapun langkah yang tengah dilakukan Perseroan dalam menghadapi tantangan disrupsi teknologi antara lain seperti Perseroan menyelaraskan kebutuhan proses bisnis dengan teknologi karena perkembangan teknologi yang semakin cepat dan kebutuhan nasabah yang semakin meningkat. Hal ini tercermin dari penyelarasan antara Rencana Bisnis Bank dan Rencana Strategi Teknologi Informasi (RSTI) tahun 2021 - 2025. Selain itu, Bank BTN juga mengimplementasikan *tools-tools security* dan menerapkan standar internasional ISO 27001:2013 untuk menjaga keamanan data dan informasi yang dimiliki Perseroan.

Aktivitas IT Security

Keamanan Teknologi Informasi

Seiring dengan perkembangan Teknologi Informasi (TI) di era digitalisasi, Bank BTN melakukan beberapa upaya untuk menjaga keamanan Teknologi Informasi (TI) melalui 3 (tiga) pilar utama, yaitu:

1. People

Bank BTN telah melakukan edukasi berupa *security awareness* secara rutin kepada seluruh pegawai, nasabah maupun pihak ketiga yang bekerja sama dengan Bank BTN. Berbagai media digunakan untuk penyampaian *security awareness* seperti *social media*, *email*, *podcast* dan *wallpaper desktop* pada perangkat kerja pegawai. Sosialisasi kepada nasabah selalu menjadi prioritas antara lain melalui media *e-channel* Bank BTN, *social media* Bank BTN dan berbagai *event offline*/

pemasaran yang dilaksanakan Perseroan, untuk melindungi informasi pribadi dan dana nasabah. Bank BTN selalu meningkatkan profesionalisme dan kompetensi pegawai sebagai mitra nasabah dengan berbagai pelatihan dan sertifikasi keamanan cyber.

2. Process

Dalam rangka menjalankan tata kelola yang baik sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku, proses-proses kerja di Perseroan telah berdasarkan ketentuan/SOP terkini yang disosialisasikan dan dijalankan dengan konsisten oleh segenap *stakeholder* Perseroan. Sejalan dengan proses kerja yang standar tersebut Bank BTN telah menjalankan inisiatif yaitu:

- Pembentukan *Security Operation Center* (SOC) untuk melakukan deteksi, tanggap insiden dan pemulihan terhadap serangan siber.
- Pembentukan *Computer Security Incident Response Team* (CSIRT) yang telah bekerja sama dengan regulator, didukung oleh teknologi terbaru dan *system monitoring* berupa *Security Incident and Event Management* (SIEM).
- Proses uji coba *response* dan *recovery* untuk memastikan kesiapan Perseroan dalam menghadapi ancaman siber juga telah dijalankan antara lain melalui simulasi *phising* dan *Tabletop exercise*.



3. Technology

Bank BTN telah mengimplementasikan teknologi keamanan terkini seperti *endpoint security*, *application security*, *cloud based security*, *Data Loss Prevention* (DLP), *Next Generation Firewall* (NGFW), otomasi *Patching* dan *Hardening*, pengamanan enkripsi data nasabah, *mobile application security*, *Multi-factor authentication* dan *cyber threat intelligence*.

360° Security By Design

Inisiasi dan Pengembangan Layanan Digital

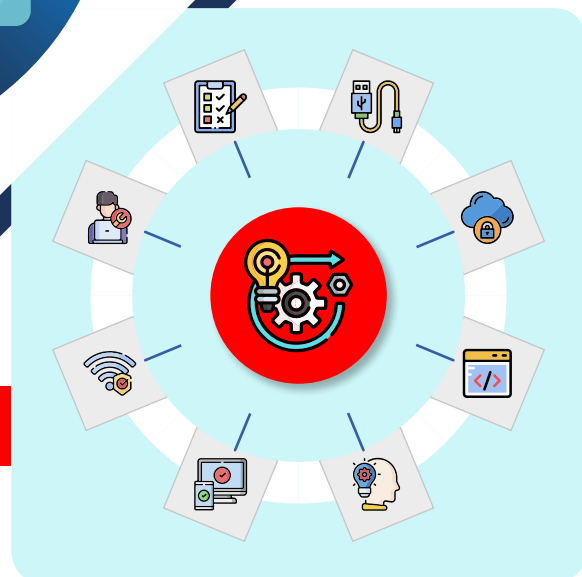
- Implementasi *Security by Design* menggunakan pendekatan *CICD-DevSecOps*.
- Pengujian keamanan menggunakan metodologi dan teknologi terkini.
- Konsisten mengimplementasikan standar OWASP untuk mengamankan aplikasi bisnis.



Pengujian Keamanan Pra-Go-live

Sebelum sistem digunakan oleh user dan/atau nasabah, sistem dilakukan pengujian keamanan terlebih dahulu melalui 3 metode antara lain sebagai berikut:

- Pengujian keamanan menggunakan teknik SAST, DAST, IAST/MAST.
- Pengujian kerentanan dan simulasi serangan siber oleh hacker dilakukan oleh konsultan (*Penetration Testing*).
- Implementasi pengamanan aplikasi menggunakan *mobile application protection*.



Pengujian Berulang dan Peningkatan Keamanan

Peninjauan dan pengujian Keamanan dilakukan secara berkala antara lain sebagai berikut:

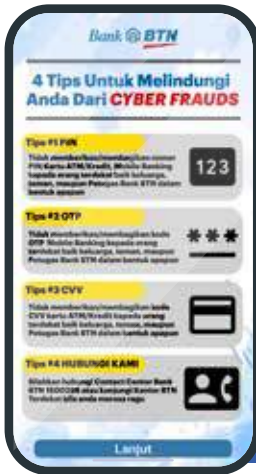
- Melakukan pengujian kerentanan dan *penetration testing* pada lingkungan *production*.
- Melakukan uji coba dan simulasi serangan siber dengan memanfaatkan referensi data dari *tools security monitoring*.
- Melakukan *table-top exercise* yang disertai dengan tindakan respon dan pemulihan.

Operasional

Dalam menjalankan proses operasional, Bank BTN telah menerapkan aspek keamanan antara lain sebagai berikut:

- Melakukan pengujian aplikasi dan *backup data center* secara berkala untuk memastikan kesiapan terhadap bencana alam dan serangan siber.
- Menerapkan penggunaan teknologi pengamanan terkini seperti *Next Generation Firewall*, *Anti-DDOS*, *Cloud Security*, *Data Loss Prevention* dan *Artificial Intelligence (AI)*.
- Menerapkan penggunaan enkripsi untuk melindungi data Perseroan dan nasabah.
- Menerapkan *Security Operation Center 24 x 7 (Blue Team)*.

Pengawasan dan Kepatuhan Standar Keamanan



Dukungan Pelanggan

- Perlindungan terhadap Penipuan Online (Social Media) Kerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
- Campaign Keamanan Transaksi.
- Call Center 24 x 7 untuk melayani keluhan nasabah terkait keamanan transaksi elektronik.

Pelaksanaan Audit dilaksanakan secara menyeluruh:

- Audit Regulator dilaksanakan oleh Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Audit External dilaksanakan oleh firma auditor bersertifikasi internasional.
- Audit Internal dilaksanakan oleh Divisi Internal Audit.

Kepatuhan Regulasi & Pengakuan Standar Keamanan

- Terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Kominfo - 001813.21/DJAI.PSE/01/2022
- Verifikasi **Cyber Security Maturity** oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dengan Score 4,68 dalam Skala 5.
- Mendapatkan status **Attestation** penerapan kontrol pengamanan Teknologi Informasi (TI) yang memenuhi standar dari SWIFT.
- Telah memiliki sertifikat internasional **ISO 27001**.
- Memiliki tim tanggap siber **CSIRT** yang telah terakreditasi oleh regulator dalam hal ini Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



Perlindungan Nasabah

- Pengamanan *Multi-factor authentication* untuk melaksanakan transaksi *financial* (PIN & SMS OTP).
- Verifikasi data nasabah *online* terhubung dengan sistem Kependudukan dan Catatan Sipil.
- Implementasi Teknologi algoritma proteksi aplikasi *mobile*.
- Implementasi sesuai dengan ketentuan UU PDP No 27 Tahun 2022.

Berbagai inisiatif tersebut dijelaskan dalam pencapaian *strategic* tahun 2023 sebagai berikut:

1. Memperoleh Sertifikasi ISO 27001
Dalam rangka memastikan bahwa SDM, tata kelola dan teknologi yang digunakan telah sesuai dengan standar industri (*International Standar Organization*), Bank BTN telah melaksanakan proses sertifikasi dan mendapatkan akreditasi No. IS 790715.
2. Pencapaian *Cyber Security Maturity* (CSM) 4.68
Bank BTN bersama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) telah melaksanakan penilaian *Cyber Security Maturity* (CSM) yang bertujuan untuk mengukur tingkat penerapan dan maturitas keamanan informasi di Bank BTN. Berdasarkan hasil dari penilaian yang dilakukan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Bank BTN mendapatkan nilai 4,68 dari skala 5 yang berarti Implementasi Optimal.
3. Mendapatkan akreditasi CSIRT dari Regulator
Bank BTN bersama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) telah melaksanakan pelatihan dan akreditasi CSIRT sehingga CSIRT Bank BTN telah resmi terdaftar sesuai dengan Surat Tanda Registrasi Tim Tanggap Insiden Siber atau CSIRT No. 141/CSIRT.01.03/BSSN/04/2023 pada 03 April 2023.
4. Implementasi teknologi *Endpoint Data Loss Prevention*
Sebagai upaya untuk melindungi data nasabah, Perseroan telah mengimplementasikan teknologi *Data Loss Prevention* untuk memitigasi terjadinya kebocoran data nasabah dan data perusahaan.

5. Implementasi Teknologi *Cyber Threat Intelligence* dan *Digital Right Protection*

Dalam rangka memastikan visibilitas keamanan Teknologi Informasi (TI) Bank BTN termonitor dengan baik, Perseroan telah menerapkan Teknologi *Cyber Threat Intelligence* (CTI) yang secara aktif melakukan pemantauan perilaku dan aktivitas pelaku kejahatan siber sehingga Bank BTN dapat mengantisipasi ancaman yang muncul. Teknologi *Cyber Threat Intelligence* (CTI) ini telah dilengkapi dengan *Digital Right Protection* yang dapat melakukan *take down* konten-konten yang mengancam reputasi dan merugikan nasabah Bank.

6. Implementasi *Multi-factor authentication* dan pengelolaan *Login Identity*

Seiring dengan maraknya pencurian identitas dan *credential login* (*username* dan *password*) oleh pelaku kejahatan siber, Bank BTN menilai implementasi *multi-factor authentication* mutlak diperlukan untuk mengamankan akses pegawai terhadap aplikasi dan sumber daya Teknologi Informasi (TI) Bank BTN.

7. Pengamanan Aplikasi *Mobile*

Dalam rangka melindungi aplikasi *mobile* yang digunakan oleh nasabah, Bank BTN telah menerapkan proses pengembangan aplikasi secara *security by design*. Penguatan di sisi perangkat akses yang digunakan nasabah juga menjadi prioritas dengan menerapkan *Mobile Application Security*.

Strategi Infrastruktur Teknologi Informasi

Pengembangan Teknologi Informasi (TI) terkait *security* telah dituangkan dalam Rencana Strategis Teknologi Informasi (RSTI) tahun 2021 – 2025 yang mengangkat tema *Security by design* untuk meningkatkan keamanan sistem dan aplikasi Perseroan, antara lain implementasi *Identity & Access Management*, *Security & Network Monitoring & Compliance* dan *Integrated Patch Management*. Sejalan dengan inisiatif tersebut aktivitas yang akan dilaksanakan antara lain Pemenuhan UU PDP No. 27 Tahun 2022, *Availability Security* Infrastruktur dan peremajaan teknologi, Pemenuhan *Regulatory Compliance*, Tata Kelola Akses Data dan Pengguna serta mitigasi terhadap *fraud* dan penyalahgunaan transaksi (Aktivitas Pencucian Uang dan Perjudian).

Pemulihan Bencana

Bank BTN telah memiliki kebijakan dan prosedur yang digunakan untuk pengelolaan apabila terjadi bencana yang tercantum pada kebijakan dan prosedur internal Bank BTN tentang Pelaksanaan *Disaster Recovery Plan* (DRP). Selain itu, Bank BTN juga telah memiliki Struktur Organisasi Pelaksanaan *Disaster Recovery Plan* (DRP), Kewenangan Organisasi *Disaster Recovery Plan* (DRP), Alur Proses *Disaster Recovery Plan* (DRP), Kategorisasi Kritisitas Recovery Sistem TI, Frekuensi dan Retensi *Backup*, Daftar Tim Kerja *Disaster Recovery Plan* (DRP), Daftar Telepon Penting hingga Daftar Kontak Pihak Penyedia Jasa.

Audit Teknologi Informasi

Untuk mendukung penyelenggaraan Teknologi Informasi (TI) yang lebih baik, Perseroan melakukan proses audit Teknologi Informasi (TI) yang dilakukan oleh Satuan Kerja Audit Internal (SKAI). Proses audit Teknologi Informasi (TI) tersebut menghasilkan *output* yang harus ditindak lanjuti berupa tindak lanjut hasil audit dan/atau penilaian atas penyelenggaraan Teknologi Informasi (TI). Hal ini dilakukan untuk memenuhi aspek *compliance* sesuai dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara Pasal 210 Ayat 1 poin a, yaitu Perseroan memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi tindak lanjut hasil audit dan/atau penilaian atas penyelenggaraan Teknologi Informasi (TI). Adapun tindak lanjut audit Teknologi Informasi (TI) atas audit yang dilaksanakan pada tahun 2023 antara lain terdapat jumlah temuan sebanyak 138 temuan, temuan yang telah diselesaikan sebanyak 82 temuan (59,42%) dan sebanyak 49 temuan belum jatuh tempo, sedangkan sisanya sebanyak 7 temuan telah jatuh tempo.

IT Maturity

Kualitas penyelenggaraan Teknologi Informasi (TI) saat ini dinilai menggunakan IT Maturity COBIT 2019, dan hasil dari pengukuran untuk 2023 dari skala 0 (*Incomplete process*) – 5 (*Optimizing process*) adalah 3,30 (*established process*). Hal tersebut berarti mayoritas proses-proses pada domain Cobit sudah terdefinisikan, terstandar, dan mencapai tujuannya dengan cara yang lebih teroganisir.

Selain itu, terkait dengan pengelolaan risiko Teknologi Informasi (TI), secara berkala Perseroan telah melakukan pengukuran tingkat risiko komposit yang merupakan hasil dari nilai risiko inheren dengan tingkat kualitas pengelolaan risiko Bank dengan menggunakan komponen-komponen parameter yang tertera pada SEOJK No. 14 / SEOJK.03/2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dan hasil dari pengukuran untuk 2023 dari skala 1 (Sangat sehat) – 5 (Tidak sehat) adalah 2,42 yang mencerminkan kondisi Bank yang secara umum sehat sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan terkait dengan risiko Teknologi Informasi (TI).

Program-Program Awareness IT

Bank BTN melaksanakan IT *Security Awareness Program* yang bertujuan meningkatkan kesadaran dan pemahaman kepada seluruh pegawai untuk menjaga keamanan informasi berupa data atau informasi pribadi dan Perseroan. Kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Penyampaian oleh *Top Management*
Top Management telah melakukan penyampaian *security awareness* kepada pegawai dengan penekanan bahwa menjaga keamanan informasi menjadi bagian yang sangat penting untuk menjaga kepercayaan nasabah dan reputasi Perseroan.
2. Sosialisasi melalui *Platform Digital* Internal Bank BTN
 - a. *Podcast*
 - b. *Learning Management System*
 - c. *Email*
 - d. *Wallpaper Desktop*
3. Pengujian Keamanan Berbasis Skenario
 Aktivitas ini dilakukan untuk menguji dan mengukur tingkat pemahaman seluruh pegawai dalam menjaga keamanan informasi.
4. Pelatihan dan *Workshop*
 Aktivitas untuk melakukan sosialisasi tentang keamanan IT secara *onsite* maupun *online* kepada seluruh pegawai Perseroan.

Struktur Pengelola Teknologi Informasi —

Satuan kerja penyelenggara Teknologi Informasi (TI) yang terdiri dari Divisi IT *Strategic Planning and Development* (ITPD), Divisi IT *Operation* (ITOD) dan Divisi *Data Management and Analytics* (DMD). Selain itu, Perseroan juga telah membentuk Divisi IT *Security* (ITSD) yang bertugas menangani ketahanan, keamanan siber, dan bersifat independen terhadap fungsi penyelenggaraan Teknologi Informasi (TI). Secara umum wewenang dan tanggung jawab pada masing-masing Divisi adalah sebagai berikut.

1. Divisi IT *Strategic Planning and Development* (ITPD) memiliki wewenang dan tanggung jawab sebagai Divisi yang menjalankan peran "*Change the Bank*" sebagai berikut:
 - a. Merencanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi, memantau dan mengendalikan kegiatan yang berhubungan dengan proses penyusunan Rencana Strategis Teknologi Informasi (RSTI) tahun 2021 - 2025 serta pengelolaan *portfolio* Teknologi Informasi (TI), kebijakan Teknologi Informasi (TI), dan strategi pengembangan aplikasi secara efektif dan efisien;
 - b. Mengelola proses pengembangan aplikasi pendukung operasional bisnis beserta *monitoring* pelaksanaannya untuk memenuhi kebutuhan operasional bisnis Perseroan;
 - c. Mengantisipasi eksposur risiko sistem informasi serta mengembangkan langkah penanganan yang tepat dan memadai;
 - d. Mendukung penerapan keamanan informasi; dan
 - e. Menyusun dan memenuhi pelaporan perencanaan dan pengembangan Teknologi Informasi (TI) serta pemenuhannya bekerja sama dengan unit terkait.
2. Divisi IT *Operation* (ITOD) memiliki wewenang dan tanggung jawab sebagai Divisi yang menjalankan peran "*Run the Bank*" sebagai berikut:
 - a. Mengembangkan strategi pengelolaan operasional, melaksanakan dan memantau operasional Teknologi Informasi (TI) secara efektif dan efisien dalam rangka menjaga tingkat layanan Teknologi Informasi (TI) untuk mendukung operasional bisnis;
 - b. Mengantisipasi eksposur risiko dalam pelaksanaan operasional Teknologi Informasi (TI), serta mengembangkan langkah penanganan yang tepat dan memadai;
 - c. Mendukung penerapan keamanan informasi; dan
 - d. Menyusun dan memenuhi pelaporan operasional Teknologi Informasi (TI) bekerja sama dengan unit terkait.
3. Divisi *Data Management and Analytics* (DMD) memiliki wewenang dan tanggung jawab sebagai Divisi yang menjalankan peran "*Change the Bank*" maupun "*Run the Bank*" sebagai berikut:
 - a. Memfasilitasi dan melakukan koordinasi terkait penetapan dan pelaksanaan *roadmap* dan visi penyampaian dan pengelolaan informasi; termasuk *Data Warehouse*, *Big Data*, *Business Intelligence & Analytics* serta *Management Data* untuk menjalankan strategi Perseroan dalam mengembangkan bisnisnya;
 - b. Berkolaborasi dengan para pimpinan *business unit* dan *support* untuk menerapkan strategi data yang disetujui, menetapkan arah strategis untuk membangun program pengelolaan data organisasi dan mengoptimalkan cara Perusahaan menggunakan data baik internal maupun eksternal;

- c. Bekerja sama dengan Satuan Kerja Penyelenggara Teknologi Informasi (TI) lainnya, Satuan Kerja Keamanan maupun pihak eksternal, dalam mengatur dan menciptakan lingkungan yang membuat data dan informasi dapat diakses dengan saluran kontrol akses yang sesuai, serta bertindak sebagai penasihat dalam penggunaan data untuk meningkatkan kinerja dan perumusan strategi perusahaan secara menyeluruh;
 - d. Mengawasi penerapan analisis data dan teknik analisis baru untuk digunakan sebagai salah satu acuan manajemen perusahaan dalam menentukan strategi pengembangan bisnis perusahaan; dan
 - e. Mengawasi proses pengumpulan dan peninjauan data dari berbagai sistem yang saat ini digunakan; membuat rekomendasi untuk memodernisasi sistem lama, dan memastikan solusi baru yang dapat menyediakan data secara tepat waktu, akurat, dan berkualitas.
4. Divisi IT Security (ITSD) memiliki wewenang dan tanggung jawab sebagai Divisi yang menjalankan peran "*Secure the Bank*" sebagai berikut:
 - a. Merancang, menerapkan, dan memelihara suatu rangkaian proses dan sistem yang terpadu dan efektif dalam mengelola keamanan informasi dan menjamin kerahasiaan, integritas, serta ketersediaan aset-aset informasi dengan meminimalkan risiko keamanan informasi;
 - b. Menyusun dan memenuhi pelaporan berkaitan pengamanan informasi bekerja sama dengan unit terkait.

Hasil Evaluasi Atas Efektivitas Penyelenggaraan Teknologi Informasi Tahun 2023 —

Sesuai dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara Pasal 210 Ayat 1 poin c, Bank BTN memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi hasil efektivitas penyelenggaraan Teknologi Informasi (TI) yang menjadi bagian dari Laporan Tahunan. Dalam hal ini, Bank BTN telah melakukan pengukuran berupa asesmen IT *Maturity Level*

untuk posisi tahun 2023 dengan menggunakan standar COBIT 2019 dan didapatkan nilai IT *Maturity Level* untuk posisi tahun 2023 sebesar 3,30. Asesmen IT *Maturity Level* tersebut dilakukan secara komprehensif pada semua domain sesuai standar COBIT 2019 antara lain domain *Align, Plan and Organize* (APO), domain *Build, Acquire and Implement* (BAI), domain *Deliver, Service and Support* (DSS), domain *Measure, Evaluate and Assess* (MEA) dan domain *Evaluate, Direct and Monitor* (EDM).

Pengembangan Kompetensi Teknologi Informasi Tahun 2023 —

Sepanjang tahun 2023, Perseroan telah melaksanakan pelatihan Teknologi Informasi (TI) dan sertifikasi untuk pegawai sesuai dengan bidang kompetensinya. Pelatihan tersebut antara lain seperti *Digital Leadership and Certification*, *NoSQL Database Fundamental For Manager and Engineer and Certification*, *UI*

UX design and Certification, *COBIT 2019 and Certification*, *Project Management Professional and Certification*, *ITIL V4 and Certification*, *CAPM and Certification*, *CGEIT and Certification*, *Project Management Prince 2 Foundation and Certification*, *CEH and Certification*, serta *Comp-TIA Security and Certification*.

Rencana Kerja Teknologi Informasi Tahun 2024

Perseroan telah membuat IT *Transformation Roadmap* yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2025 dengan 6 (enam) tema teknologi utama untuk mencapai visi dan misi Perseroan di masa depan yaitu *end to end housing ecosystem digitalization, digitized operations, data-driven bank, flexible multi-speed IT, elastic & resilient infrastructure* dan *security by design*. Pengembangan Teknologi Informasi (TI) pada tahun 2024 mendukung rencana korporasi serta aspirasi kebijakan umum direksi di tahun 2024 pada bidang kredit dan kualitas kredit, bidang pendanaan dan jaringan kantor, bidang *fee based income* dan bidang beban *overhead*. Secara garis besar strategi pengembangan Teknologi Informasi (TI) tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan *Integrated Partner Management* seperti *Enhancement* BTN Properti *for Developer* dan *Enhancement* aplikasi mitra.
2. Pengembangan *Integrated Digital Lending System* seperti *Enhancement* BTN Properti, *Enhancement* aplikasi Survei/OTS termasuk *Geotagging* dan *Geographic Information System (GIS)*, *Enhancement* *Loan System Family* terkait *Loan Origination System*, *Loan Monitoring*, *Collection* dan *Restructuring System*, *Platform* BTN Ready, implementasi *Decision Engine System*, *Enhancement* H2H dengan pihak ketiga, seperti asuransi (Penjaminan, Klaim, Subrogasi), pengembangan aplikasi pengajuan kredit UMKM berbasis Web, *Joint Finance*, modernisasi *Loan Platform* dan *Integration Platform*.
3. Pengembangan *Loyalty System* seperti pengembangan aplikasi Poin Spekta dan PLUS dapat membantu mengelola program loyalitas yang depersonalisasi untuk membangun hubungan yang lebih kuat dengan nasabah.
4. Modernisasi *Digital Channel* melalui pengembangan *New Mobile Banking* untuk konvensional dengan penambahan fitur-fitur baru (seperti *Online Money Changer*, BTN Ready, dan lainnya), *New Mobile Banking Sharia*, *Internet Banking Business*, *Online Onboarding* dengan E-KYC untuk konvensional dan syariah, *Enhancement* *Mobile Apps* kartu kredit, pengembangan fitur EDC *E-Commerce/Online Acquiring* dan kerja sama operasional EDC, VISA Paywave, penggunaan kartu lain pada EDC mini ATM, QRIS Crossborder, *Online Acquiring*, *Virtual Account* Syariah, serta kerja sama operasional ATM.
5. Pengembangan *API Enablement* seperti *API Management & Sandboxing*, implementasi *high availability* untuk *API Management* dan penambahan fitur-fitur API.
6. Modernisasi *Core Banking System* dan *Branch Delivery System* seperti *Enhancement* *Core Banking System (CBS)* maupun *Branch Delivery System (BDS)* seperti penambahan *currency* pada produk valas ritel dan implementasi *New Core Banking System Sharia*.
7. Melakukan *General Ledger (GL) System Improvement*.
8. Pengembangan *Integrated Customer Service* seperti *Omni Channel* (modernisasi aplikasi *Contact Center*).
9. Implementasi *Enterprise Document Management System*.
10. Modernisasi *Cash Management System* seperti integrasi dengan ekosistem, penambahan fitur *payment* kepada pihak ketiga, penambahan fitur *National Cash Pooling* dan *Mobile Cash Management*.
11. Implementasi *Wealth Management System*.
12. Pengembangan sistem untuk mendukung *Wholesale Banking* seperti implementasi *Custody System*, *Trade Finance*, *E-Bank Garansi*, *Supply Chain Management System* konvensional dan syariah.
13. Implementasi *End to End Procurement*.
14. Implementasi *Treasury System* dan *Settlement System*, seperti *Upgrade Treasury Core System*, pengembangan produk seperti *Market Linked Deposit*, *Dual Currency Investment*, *Call Spread Option* untuk mendukung bisnis *treasury*.
15. Implementasi *Enterprise Risk Management System* seperti *Market Risk System*, *Enhancement* aplikasi *Fraud Detection System* dan *Enhancement* *Operation Risk System*.
16. Implementasi sistem terkait dengan tema *data driven*, seperti implementasi *Data Lake*, *Data Mover*, *Enterprise Data Warehouse* dan *Master Data Management*.
17. Modernisasi *HC system* untuk mencapai misi Bank BTN menjadi *one of home of Indonesia's best talent*.
18. Implementasi pengembangan Teknologi Informasi (TI) untuk mendukung *multi-speed* seperti adopsi *Tools Agile Delivery* serta implementasi *agile*.
19. Meningkatkan kapabilitas sistem pembayaran seperti pengembangan sistem *Fast Payment (BI-Fast Tahap 2)* maupun sistem untuk mendukung bisnis *remittance*, seperti *Host To Host Incoming Transfer*.
20. Implementasi infrastruktur yang *elastic and resilient* seperti implementasi *Cloud Journey*, *End To End Monitoring (Data Center, Fail Over dan aplikasi)*, *Data Center Operation & Infrastructure Improvement* seperti modernisasi infrastruktur, sistem/software, perluasan scope *Asset Management Tools*, implementasi *Tools Integrated Monitoring System* dan *Branch Infrastructure*.
21. Pengembangan Teknologi Informasi (TI) terkait *security by design* seperti implementasi *Identity & Access Management*, *Security & Network Monitoring & Compliance* seperti menerapkan *End Point Protection*, implementasi solusi pengamanan *Cyber Threat Intelligence* dan *Integrated Patch Management*.

Selain pengembangan Teknologi Informasi (TI), Perseroan akan melakukan evaluasi dan pengkinian kebijakan Teknologi Informasi (TI) terhadap peraturan regulator, kebijakan internal maupun berdasarkan *best practice* yang ada, sedangkan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas tim Teknologi Informasi (TI), Perseroan akan melakukan pelatihan dan sertifikasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing.



TATA KELOLA PERUSAHAAN



“

Penerapan GCG meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas Perseroan sehingga mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya. GCG menjadi upaya berkesinambungan untuk mencapai tujuan yaitu *Moving Beyond Corporate Governance to True Business Value*.



Pencapaian Dalam Penerapan Tata Kelola Perusahaan —



1



2



4



3

Keterangan Foto:

1. Corporate Governance Perception Index (CGPI) sebagai Most Trusted Companies.
2. **GRC and Performance Excellence 2023**
Kategori:
 - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai The Greatest Champions of GRC Excellence Performance 2023 (Banking Industries).
 - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai The Best GRC for IT/ Digital Transformation 2023 (Banking Industries)
 - Bapak Nixon L.P Napitupulu sebagai The Best CEO for GRC Excellence 2023 (Banking Industries).
 - Bapak Eko Waluyo sebagai The Best Chief Compliance Officer 2023 (Banking Industries).
3. **TOP GRC 2023**
Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai:
 - Top GRC award 2023 Star 5
 - The most Committed GRC Leader 2023
 - The High Performing of Commissioner on GRC 2023
4. **ASEAN Corporate Governance Scorecard - IICD**
 - Top 50 Emiten Kapitalisasi Pasar Terbesar (BigCapPLCs) dengan Praktek Tata Kelola Perusahaan Terbaik
 - The Best Financial Sector 2023

Dasar Penerapan Tata Kelola Perusahaan —

Dasar penerapan GCG di lingkungan Perseroan merujuk pada berbagai ketentuan, peraturan, dan perundang-undangan yang relevan serta mengacu pada pedoman GCG yang diterbitkan oleh lembaga nasional maupun internasional. Dasar rujukan penerapan GCG Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
3. Peraturan OJK Nomor 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
4. Peraturan OJK Nomor 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
5. Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
6. Peraturan OJK Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik
7. Peraturan OJK Nomor 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten Atau Perusahaan Publik
8. Peraturan OJK Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.
9. Peraturan OJK Nomor 5/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank.
10. Peraturan OJK Nomor 37/POJK.03/2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank.
11. Peraturan OJK Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
12. Peraturan OJK Nomor 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
13. Peraturan OJK Nomor 60/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu.
14. Peraturan OJK Nomor 5/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank.
15. Peraturan OJK Nomor 29/POJK.03/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.
16. Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka.
17. Peraturan OJK Nomor 15/POJK.03/2019 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
18. Peraturan OJK Nomor 16/POJK.03/2019 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
19. Peraturan OJK Nomor 17/POJK.03/2019 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
20. Peraturan OJK Nomor 42/POJK.03/2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank.
21. Peraturan OJK Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
22. Surat Edaran OJK Nomor 14/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
23. Surat Edaran OJK Nomor 15/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
24. Surat Edaran OJK Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
25. Surat Edaran OJK Nomor 25/SEOJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank Umum.
26. Surat Edaran OJK Nomor 43/SEOJK.03/2016 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional.
27. Surat Edaran OJK Nomor 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
28. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.
29. Anggaran Dasar Perseroan yang telah mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana diubah terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 28 tanggal 28 Maret 2023 dibuat oleh Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan yang telah mendapat persetujuan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0023685. AH.01.02. TAHUN 2023 tanggal 20 April 2023.

Selain itu, Perseroan mengadopsi berbagai standar tata kelola terbaik yang berlaku di regional maupun internasional dan meningkatkan cakupan implementasi GCG antara lain sebagai berikut:

1. Prinsip-prinsip *Corporate Governance* yang dikembangkan oleh *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD).
2. ASEAN *Corporate Governance* (CG) Scorecard yang diterbitkan oleh ASEAN *Capital Market Forum* (ACMF).
3. Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) yang dikembangkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG).
4. Pedoman GCG Perbankan Indonesia yang dikembangkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG).
5. *Principles for Enhancing Corporate Governance* yang diterbitkan oleh *Basel Committee on Banking Supervision*.



Tujuan dan Prinsip Penerapan Tata Kelola —

Perseroan menyadari bahwa keberlangsungan usaha suatu entitas usaha tidak hanya diukur dari performa keuangan serta peningkatan keuntungan semata, namun juga melalui pengelolaan internal perusahaan di antaranya yaitu pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) yang efektif. Pada dasarnya Perseroan menerapkan prinsip-prinsip GCG dengan tujuan dan keyakinan bahwa hal ini akan menjamin terciptanya keseimbangan bisnis secara menyeluruh sehingga segenap bentuk kepentingan, baik bisnis maupun sosial, individu dengan kelompok, internal juga eksternal, jangka pendek dan jangka panjang serta kepentingan *shareholders* dan *stakeholders* akan menuju pada titik keseimbangan. Penerapan prinsip-prinsip GCG sangat diperlukan, agar Perseroan menjadi lebih tangguh dan mampu bertahan dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat. Perseroan terus berupaya mengikuti perkembangan praktik GCG terbaik di tingkat nasional, regional maupun internasional yang relevan dan tentunya disesuaikan dengan kebutuhan.

Penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik di Perseroan bertujuan antara lain untuk:

1. Mendukung visi Perseroan, yaitu “Menjadi *The Best Mortgage Bank in Southeast Asia* pada tahun 2025”
2. Mendukung misi Perseroan, yaitu:
 - a. Secara aktif mendukung pemerintah dalam memajukan kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui kepemilikan rumah.
 - b. Mewujudkan kehidupan yang diimpikan jutaan rakyat Indonesia melalui penyediaan rumah yang layak.
 - c. Menjadi *One of Home of Indonesia’s Best Talent*.
 - d. Meningkatkan *shareholder value* dengan berfokus pada pertumbuhan profitabilitas yang berkelanjutan sebagai perusahaan *blue chip* dengan prinsip manajemen risiko yang kokoh.
 - e. Menjadi mitra keuangan bagi para pemangku kepentingan dalam ekosistem perumahan dengan menyediakan solusi menyeluruh dan layanan terbaik melalui inovasi digital.
3. Memberikan manfaat dan nilai tambah (*added value*) bagi para pemegang saham (*shareholders*) dan para pemangku kepentingan (*stakeholders*).
4. Mempertahankan dan meningkatkan kelangsungan usaha yang sehat dan kompetitif dalam jangka panjang (*sustainable*).
5. Meningkatkan kepercayaan para investor kepada Perseroan.

Penerapan GCG dilakukan berlandaskan kelima prinsip berikut:

TRANSPARANSI (*TRANSPARENCY*)

Transparansi adalah keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan serta keterbukaan dalam mengungkapkan segala informasi yang relevan mengenai perusahaan.

AKUNTABILITAS (*ACCOUNTABILITY*)

Akuntabilitas merupakan kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organisasi yang berimplikasi efektif terhadap pengelolaan perusahaan.

TANGGUNG JAWAB (*RESPONSIBILITY*)

Tanggung jawab adalah prinsip yang mengacu terhadap pengelolaan perusahaan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam lingkup peraturan intern perusahaan maupun ekstern perusahaan dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang terkait dan prinsip korporasi yang sehat.

KEMANDIRIAN (*INDEPENDENCE*)

Independency atau kemandirian adalah keadaan dimana perusahaan terkait dikelola secara profesional dan mampu melindungi perusahaan dari benturan-benturan maupun intervensi kepentingan luar perusahaan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.

KESETARAAN DAN KEWAJARAN (*FAIRNESS*)

Merupakan keadilan yang merata yang tercipta di lingkungan perusahaan maupun dengan *stakeholders* yang timbul dari perjanjian antara Perseroan dengan pihak-pihak terkait dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

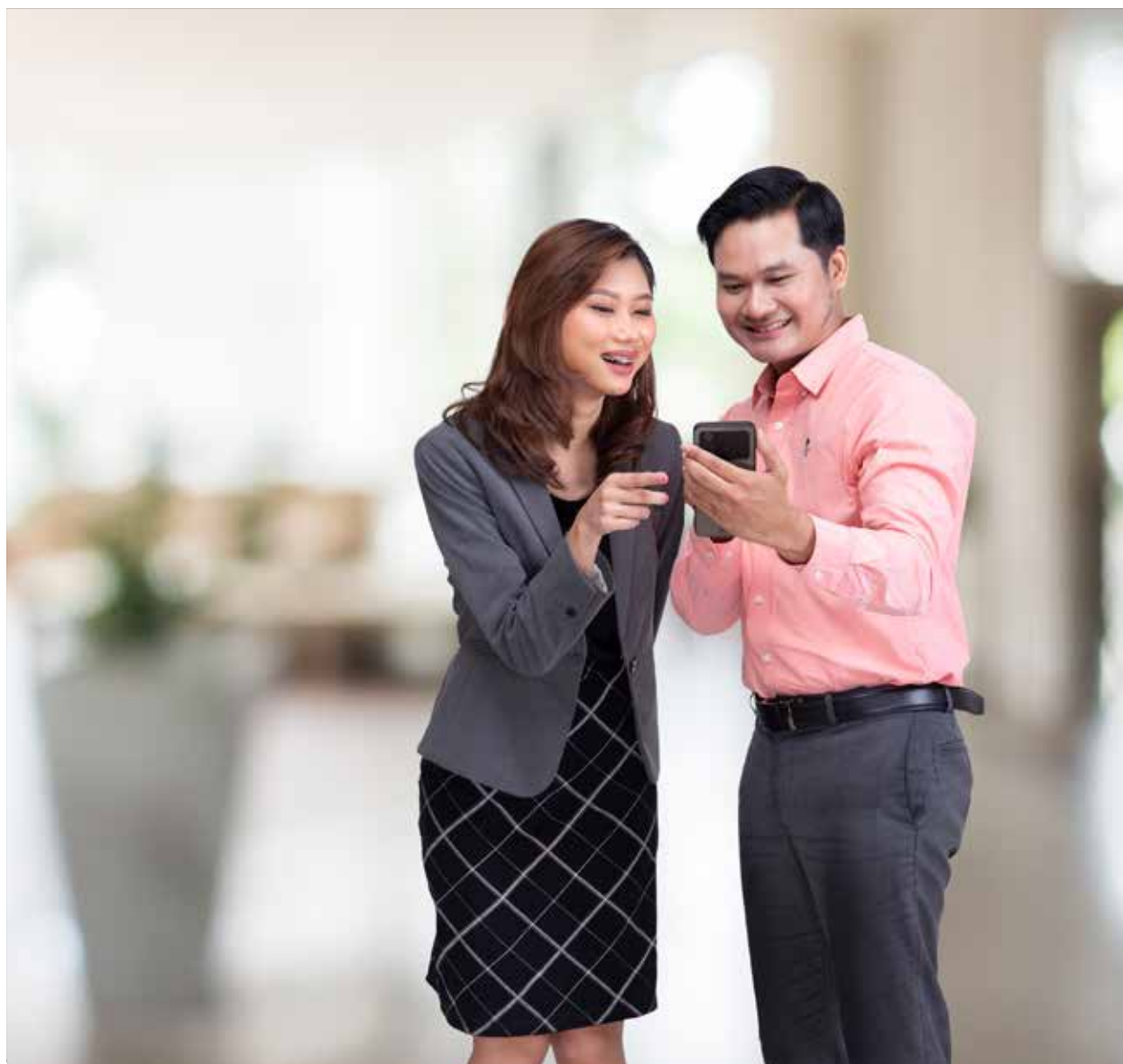
GCG merupakan alat yang dipergunakan oleh organ Perseroan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas Perseroan sehingga mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan etika bisnis. Semakin kompleks risiko yang dihadapi bank maka semakin meningkat pula kebutuhan praktik tata kelola oleh Perseroan.

Lebih dari itu, GCG menjadi upaya berkesinambungan untuk merespon secara proporsional kebutuhan implementasi GCG sehingga mencapai tujuan untuk *Moving Beyond Corporate Governance to True Business Value*. Perseroan menjadi bank BUMN yang membanggakan dan berpartisipasi dalam mewujudkan kemajuan dan kemakmuran bangsa. Untuk itulah Perseroan senantiasa mengelola setiap kegiatan usahanya dengan profesional dan memegang teguh prinsip GCG. Hal tersebut dimulai dengan adanya sumber daya manusia yang handal, profesional, berintegritas, berakhlak dan moral yang baik.

Komitmen Penerapan Tata Kelola Perusahaan —

Perseroan senantiasa memperkuat komitmen untuk menerapkan dan menegakkan prinsip-prinsip GCG secara konsisten di setiap kegiatan usaha sehari-hari, mematuhi setiap peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku, dan selalu terbuka dalam hal perbaikan sesuai dengan *best practice* agar sesuai dengan tujuan, visi, dan misi Perseroan dan menciptakan nilai tambah Perseroan bagi Pemegang Saham serta pemangku kepentingan lainnya.

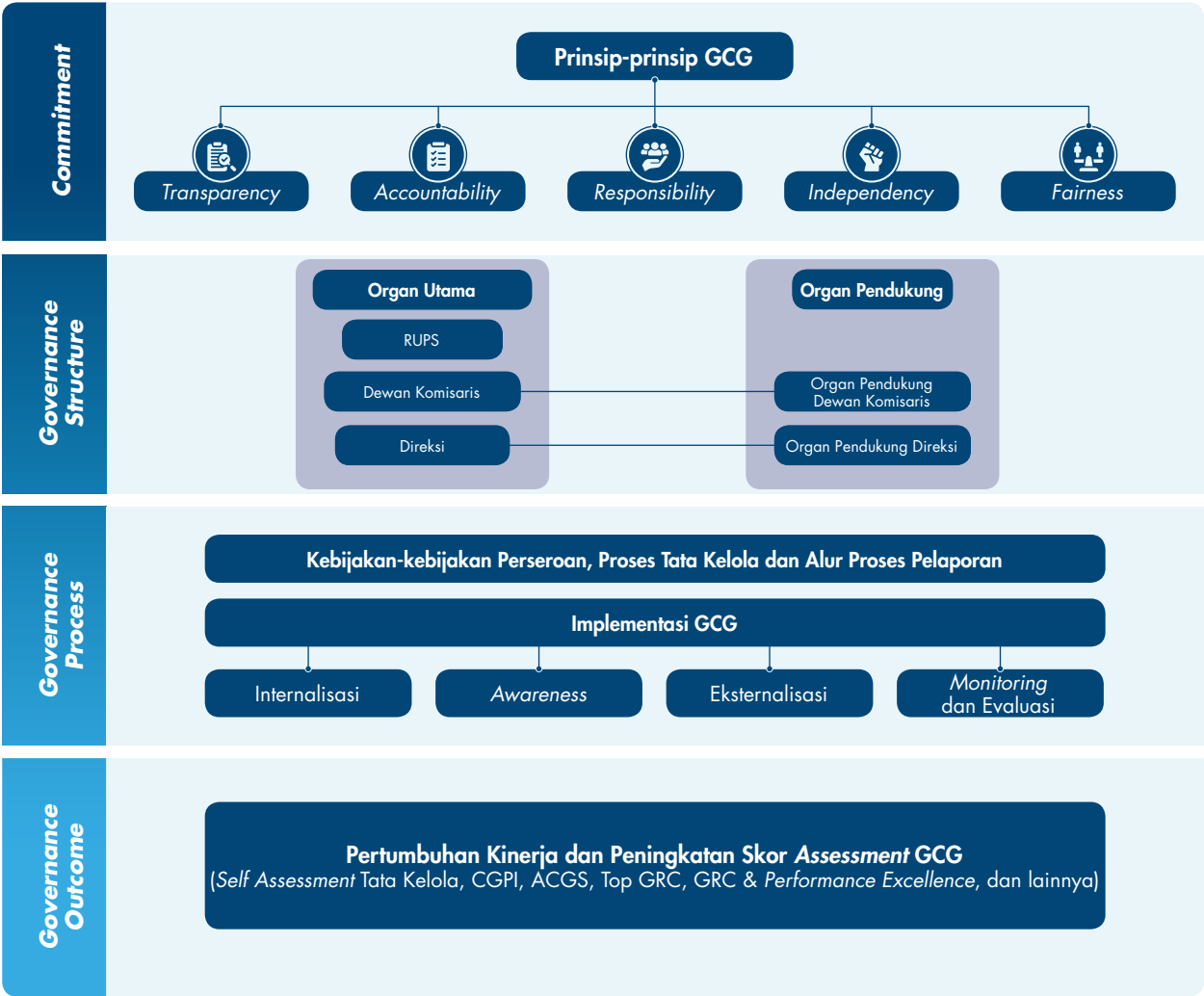
Penerapan tata kelola perusahaan yang baik (GCG) merupakan salah satu indikator penting bagi pemegang saham untuk menilai kinerja Perusahaan dan meyakini bahwa Perusahaan telah dikelola dengan baik serta diyakini mampu untuk melindungi kepentingan seluruh pemegang saham. Perseroan sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan juga perusahaan publik, berkomitmen untuk terus meningkatkan penerapan tata kelola perusahaan yang baik dalam rangka memahami harapan dari setiap pemegang saham.



Implementasi Tata Kelola Perusahaan

Govenance Framework

Implementasi Tata Kelola Perusahaan dapat terlihat dari keselarasan 3 (tiga) aspek *governance system* yaitu *governance structure*, *governance process* dan *governance outcome*. Ketiga aspek *governance system* tersebut telah diimplementasikan dengan baik oleh Perseroan.



Governance structure merupakan kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Perusahaan agar proses penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan Pemangku Kepentingan Perusahaan. Struktur organ Tata Kelola meliputi Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite dan Satuan Kerja Perusahaan. Sedangkan yang termasuk dalam infrastruktur Tata Kelola antara lain adalah kebijakan dan prosedur, sistem informasi manajemen serta tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi. *Governance process* merupakan aktivitas pelaksanaan penerapan tata kelola pada Perseroan yang didukung dengan sistem yang terstruktur dan proses *monitoring* yang optimal. *Governance outcome* merupakan hasil atas implementasi kecukupan *governance structure* dan *governance process*.

Komitmen Tata Kelola

Perseroan berkomitmen untuk terus mengevaluasi, memperbaiki, meningkatkan dan menyempurnakan implementasi GCG, agar selaras dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kondisi usaha terkini. Komitmen GCG Perseroan tertanam dalam visi dan misi, *core value*, serta strategi kebijakan bisnis Perseroan yang kemudian dituangkan ke dalam elemen-elemen fundamental usaha Perseroan sebagai berikut:

VISI DAN MISI

Perseroan mempunyai visi yang mencerminkan tujuan yang akan dicapai yaitu “Menjadi *The Best Mortgage Bank in Southeast Asia* pada tahun 2025”. Untuk mencapai tujuan tersebut Perseroan menjabarkannya ke dalam beberapa Misi. Secara lebih jelas Visi dan Misi dijelaskan pada Bab Profil Perusahaan.

NILAI-NILAI PERUSAHAAN (CORE VALUE)

Sejalan dengan upaya penguatan pondasi dasar dan pembangunan momentum budaya, transformasi budaya perusahaan dilakukan dengan meningkatkan pemahaman dan kapabilitas dalam menerapkan AKHLAK untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Sejalan dengan *core values* AKHLAK tersebut, maka perilaku utama BTNers dapat dikelompokkan menjadi 8 (delapan) poin utama:

1. Berpegang teguh dan patuh pada etika bisnis dan peraturan yang berlaku;
2. Terus belajar untuk meningkatkan kompetensi;
3. Disiplin, konsisten dan tuntas dalam menyelesaikan tugas dengan kualitas hasil terbaik;
4. Saling menghormati, menghargai dan terbuka terhadap perbedaan;
5. Bertanggung jawab dan selalu mengedepankan kepentingan Perseroan;
6. Proaktif, efektif dan efisien dalam memenuhi kebutuhan pelanggan;
7. Cepat tanggap terhadap perubahan serta memberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan yang berkelanjutan.
8. Terbuka untuk bekerja sama yang menghasilkan nilai tambah.

Pedoman Dewan Komisaris dan Direksi

Perseroan mempunyai Pedoman Dewan Komisaris dan Direksi yang memuat:

1. Pengorganisasian perseroan dan pembidangan tugas;
2. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang;
3. Etika kerja;
4. Pengaturan rapat;
5. Larangan terhadap Dewan Komisaris dan Direksi;
6. Evaluasi kinerja Direksi;
7. Pola hubungan kerja Direksi dan Dewan Komisaris.

Pedoman tersebut digunakan sebagai acuan bagi Dewan Komisaris dan Direksi dalam melaksanakan tugas guna mencapai tujuan usaha Perseroan. Secara lebih jelas Pedoman Dewan Komisaris dan Direksi dijelaskan pada masing-masing Sub Judul Dewan Komisaris dan Direksi pada Bab Tata Kelola Perusahaan.

Kode Etik

Perseroan menyusun Kode Etik Bank sebagai pedoman tentang etika usaha, etika bekerja dan tata perilaku BTNers dalam melaksanakan praktik-praktik pengelolaan perusahaan yang baik, termasuk berinteraksi dengan pemangku kepentingan. Kode Etik Perusahaan berlaku bagi seluruh BTNers di seluruh jenjang organisasi. Secara lebih jelas Kode Etik dijelaskan pada Sub Judul Kode Etik pada Bab Tata Kelola Perusahaan.

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) adalah kegiatan yang merupakan komitmen Perseroan terhadap pembangunan yang berkelanjutan. Hal ini dilaksanakan dengan memberikan manfaat pada ekonomi, sosial, lingkungan serta hukum dan tata kelola dengan prinsip yang lebih terintegrasi, terarah, terukur dampaknya serta dapat dipertanggungjawabkan dan merupakan bagian dari pendekatan bisnis perusahaan. Secara lebih jelas Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dijelaskan pada Bab Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Rencana Implementasi ISO 37000:2021 *Governance of Organizations*

Perseroan juga berkomitmen dalam melaksanakan tata kelola perusahaan dengan rencana mengadopsi ISO 37000:2021 *Governance of Organizations* yang bertujuan dalam rangka menciptakan nilai tambah dan keberlanjutan bagi organisasi.

Governance Structure

Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menyebutkan bahwa Organ Perseroan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris. RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris saling menghormati tugas, tanggung jawab dan wewenang masing-masing sesuai peraturan perundang-undangan dan Anggaran



Dasar. Organ Perseroan dibangun untuk menjamin pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan dapat berjalan dengan efektif dengan peran dan tanggung jawab yang jelas sehingga tercipta mekanisme kontrol *check and balance*. Secara lebih jelas struktur dan mekanisme Tata Kelola dijelaskan pada Sub Bab Struktur dan Mekanisme Tata Kelola Perusahaan.

Governance Process

Proses Tata Kelola yang dilakukan Perseroan oleh organ perusahaan dan jajaran di bawahnya dalam menjalankan fungsi dan tugasnya dalam mewujudkan komitmen dan struktur tata kelola, untuk mencapai hasil tata kelola yang sesuai dengan prinsip-prinsip Tata Kelola. Proses Tata Kelola Perseroan antaranya meliputi:

1. Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
2. Pelaksanaan Fungsi, Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Direksi.
3. Pelaksanaan *Business Process Improvement* (BPI) dan Kegiatan Usaha Perusahaan.
 - a. Perseroan telah melakukan pemisahan Divisi CRSD menjadi CRSD 1 dan CRSD 2 untuk pemisahan pengelolaan *Early Bucket* dan *Late Bucket* untuk menjaga kualitas portfolio kredit Perseroan.
 - b. Perseroan telah membentuk Personal Banking Division (PBD) dalam rangka mendukung pencapaian high yield loan.
 - c. Pembentukan Human Capital Business Partner (HCBP) yang berperan sebagai partner bisnis yang efektif dalam mendorong dan memastikan keselarasan strategi dan operasional *Human Capital* untuk memenuhi kebutuhan bisnis dan mendukung strategi korporasi.
 - d. Pembentukan Environmental, Social & Governance (ESG Department) dalam rangka mendukung penerapan prinsip keuangan berkelanjutan (SDGs).
 - e. Perseroan telah membentuk RLPC-BC (Regional Loan Processing Center-Business Control), CBC-BC (Commercial Banking Center-Business Control) dan RBC (Regional Business Control) di bawah supervisi Kantor Wilayah dan garis koordinasi ke Satuan Kerja Manajemen Risiko yang berfungsi untuk meningkatkan pengawasan dan mitigasi Risiko Operasional Kantor Cabang dan Kantor Wilayah.
 - f. Telah dilakukan pengembangan sistem *Operational Risk Management Information System* (ORMIS) yang terdiri dari RCSA, LED dan KRI pada masing masing unit kerja. Saat ini telah diimplementasikan pada seluruh Kantor Wilayah dan Kantor Cabang.
 - g. Implementasi BPI Kredit Konsumer *Fase 2* yang mencakup proses pencairan otomatis dan *management stock*.
 - h. Implementasi Digitalisasi & Otomasi Project (BPI *Consumer Project: Decision Engine*).
 - i. Sentralisasi proses operasional ke Wilayah dan Kantor Pusat, melalui sentralisasi proses pengadaan dan pengelolaan vendor, sentralisasi proses akuntansi dan *reporting*, sentralisasi pengelolaan kas melalui implementasi *Regional Cash Operation Management*.

- j. Optimalisasi KCP yang tidak produktif melalui Substitusi layanan ke *Digital Channel* dengan menutup outlet/KCP yang tidak produktif.
 - k. Implementasi *Sales Center* yang bertugas untuk melakukan pengelolaan KPR Non Subsidi untuk *Segment Emerging Affluent*.
 - l. Pembentukan sentra kredit UMKM BTN yang bertugas untuk menyalurkan produk Kredit Mikro BTN yaitu KUR dan Kredit SME s.d. Rp. 500 Juta.
 - m. Penguatan Organisasi BTN melalui penerapan *Strategic Business Unit* (SBU).
4. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Governance Outcome

1. GCG *Assessment* (BI/OJK) berdasarkan hasil *self assessment* dengan nilai komposit peringkat 2.
2. GCG *Third Party Assessment* (CGPI, ACGS, Top GRC, dan lainnya).
3. Laporan Tata Kelola 2022.
4. Pertumbuhan kinerja keuangan yang berkelanjutan/*sustainable*.
5. Pembentukan sistem integritas berkelanjutan.

Penyempurnaan Pedoman dan Tata Kelola Penyusunan Kebijakan

Perseroan melalui keputusan Direksi melakukan perubahan Arsitektur Kebijakan dan Prosedur yang berlaku mulai sejak tanggal 2 Februari 2022. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan *governance* dan tata kelola peraturan internal sehingga akan lebih tertata, tidak saling tumpang tindih, lebih ramping dan memudahkan pegawai dalam menggunakan sebagai pedoman pelaksanaan operasional sehari-hari. Perseroan telah menyusun kebijakan khusus nomor KK.9.A tanggal 22 Maret 2022 perihal Prosedur Tata Kelola Peraturan Internal Bank dan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Kemudahan dan Kejelasan
2. Efisiensi dan Efektivitas
3. Selaras
4. Terukur
5. Dinamis
6. Berorientasi pada pengguna atau pihak yang dilayani
7. Kepatuhan Hukum
8. Kepastian Hukum

Dalam rangka memperkuat aspek tata kelola dan menghilangkan tumpang tindih peraturan serta mempermudah pegawai dalam melakukan aktivitas operasional sehari-hari, maka Perseroan perlu melakukan transformasi yang salah satunya adalah dalam bentuk transformasi peraturan internal. Transformasi peraturan internal dimaksud diwujudkan dalam bentuk penerapan Arsitektur Peraturan Internal menjadi sebagai berikut:



Seluruh Peraturan Internal eksisting dengan Arsitektur Kebijakan dan Prosedur lama telah ditransformasikan ke Arsitektur Kebijakan dan Prosedur Baru dengan rincian sebagai berikut:

1. Telah terbit 9 (sembilan) Kebijakan Umum yang menjadi *Umbrella Policy* bagi seluruh aktivitas operasional Perseroan.
2. Telah terbit 150 (seratus lima puluh) Kebijakan Khusus (KK) yang merupakan peraturan turunan dari Kebijakan Umum.
3. Telah terbit 239 (dua ratus tiga puluh sembilan) Petunjuk Teknis yang merupakan peraturan turunan dari Kebijakan Khusus.

Selain itu, Perseroan juga melakukan pencabutan terhadap peraturan internal eksisting yang sudah tidak berlaku atau tidak dipergunakan lagi. Pada transformasi Peraturan Internal ini, Bank BTN juga menggunakan *platform digital* sebagai sarana penyebar luasan Peraturan Internal terbaru yang dapat diakses oleh seluruh pegawai yaitu melalui aplikasi PPDigital. Adanya PPDigital ini akan mempermudah pegawai dalam mendapatkan informasi mengenai Peraturan Internal terbaru dan yang berkaitan dengan pekerjaan serta aktivitas pegawai dimaksud.

Penyempurnaan Peraturan Tata Kelola

Pada tahun 2023, Perseroan telah menyusun dan memperbarui kebijakan diantaranya:

1. Kebijakan Umum Nomor KU.6 tanggal 5 Desember 2022 perihal Hukum, Kepatuhan, APU & PPT dan Tata Kelola Perusahaan.
2. Kebijakan Khusus Nomor KK.6-F tanggal 28 Agustus 2023 tentang Prosedur Tata Kelola Perusahaan *Good Corporate Governance*.
3. Kebijakan Khusus Nomor KK.6-H tanggal 10 Oktober 2023 tentang Prosedur Penanganan Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*).

4. Pembaruan KK Nomor KK.6-E tanggal 13 Desember 2023 tentang Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan (ISO 37001:2016).
5. Petunjuk Teknis Nomor PT.6-F.1 tanggal 15 September 2023 tentang Penilaian Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*).

Penyempurnaan Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dan Direksi

1. Pedoman dan Tata tertib Kerja Dewan Komisaris Nomor 05/KOM/BTN/2023 tanggal 13 Desember 2023 tentang Pedoman dan Tata Tertib kerja Dewan Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
2. Pedoman dan Tata tertib Kerja Direksi melalui Kebijakan Khusus Nomor KK.6-G tanggal 12 September 2023 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi.

Penyempurnaan Piagam Komite Dewan Komisaris dan Kebijakan Komite Direksi

1. Piagam Komite di bawah Dewan Komisaris
 - a. Piagam Komite Audit Nomor 06/KOM/BTN/2023 tanggal 13 Desember 2023 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit.
 - b. Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi Nomor 07/KOM/BTN/2023 tanggal 13 Desember 2023 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
 - c. Piagam Komite Pemantau Risiko Nomor 08/KOM/BTN/2023 tanggal 13 Desember 2023 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko.
2. Piagam Komite Direksi
 - a. Kebijakan Khusus Nomor KK.9-D tanggal 30 Maret 2023 tentang Prosedur Tata Kelola Komite Direksi

Sertifikasi dan *Surveillance* ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan

Dalam upaya mempertahankan sertifikat ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), Perseroan melakukan audit resertifikasi dan audit *surveillance* ISO 37001:2016 SMAP. Pada tanggal 24 – 28 Juli 2023, Perseroan telah berhasil mempertahankan sertifikasi SMAP dengan mendapatkan sertifikat atas audit resertifikasi dan audit *surveillance* oleh Badan Sertifikasi ISO 37001:2016 SMAP di lingkup pengadaan barang dan/atau jasa pada Procurement and Fixed Asset Management Division (PFAD), perkreditan Komersial pada Commercial Banking Division (CMBD), Corporate Banking Division (CBD), dan Wholesales Credit Risk Division (WRD), dan perkreditan *small medium* pada seluruh Kantor Wilayah pada SME *Restructuring*. Selain itu Perseroan telah melakukan perluasan ruang lingkup ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) pada lingkup Small Medium Enterprise Banking Division (SMBD) dan 4 *Commercial Banking Center* (Jakarta Raya, Bintaro, Bekasi dan Bandung). Perseroan senantiasa berkomitmen untuk melakukan *continuous improvement* dalam menerapkan ISO 37001:2016 SMAP guna mewujudkan Perseroan bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme.



Penguatan Implementasi Pedoman Tata Kelola OJK dan ASEAN CG SCORECARD

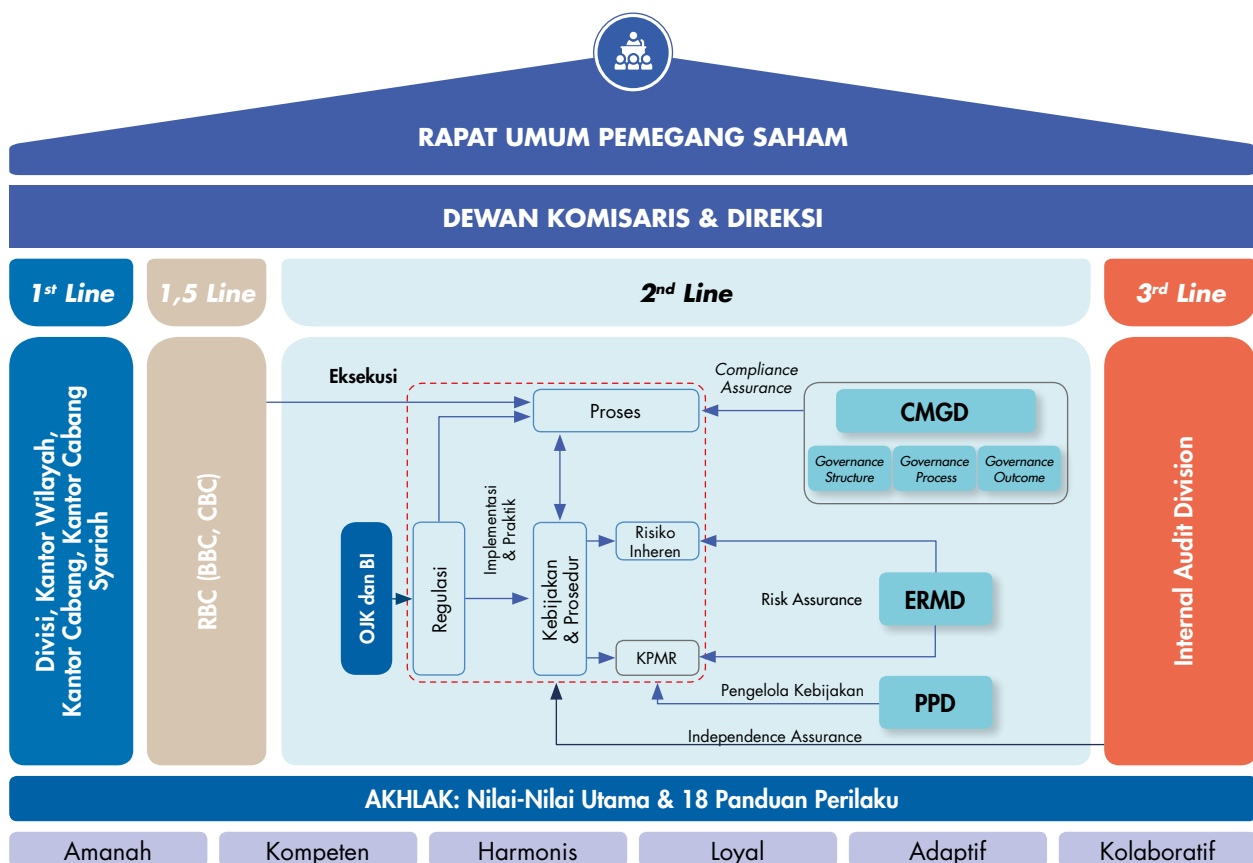
Peningkatan kualitas tata kelola dengan penerapan ASEAN CG Scorecard dilakukan sesuai dengan amanat Peraturan OJK No.21/POJK.04/2015 dan SEOJK No.32/ SEOJK.04/2015 serta best practice tata kelola internasional. Terbitnya sejumlah Peraturan OJK baru selama tahun 2023 tentunya menjadi aspek kepatuhan yang senantiasa dijaga oleh Perseroan. Yakni antara lain terkait dengan POJK Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan POJK No. 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Jasa Keuangan.

Program Zero Tolerance To Fraud & Zero Defect

Perseroan telah menerapkan tata kelola *fraud risk management* melalui penerapan 4 (empat) pilar strategi anti *fraud* yaitu pencegahan, deteksi, investigasi pelaporan sanksi serta pemantauan evaluasi dan tindak lanjut.

Inisiatif Implementasi Integrated Governance, Risk and Compliance (IGRC)

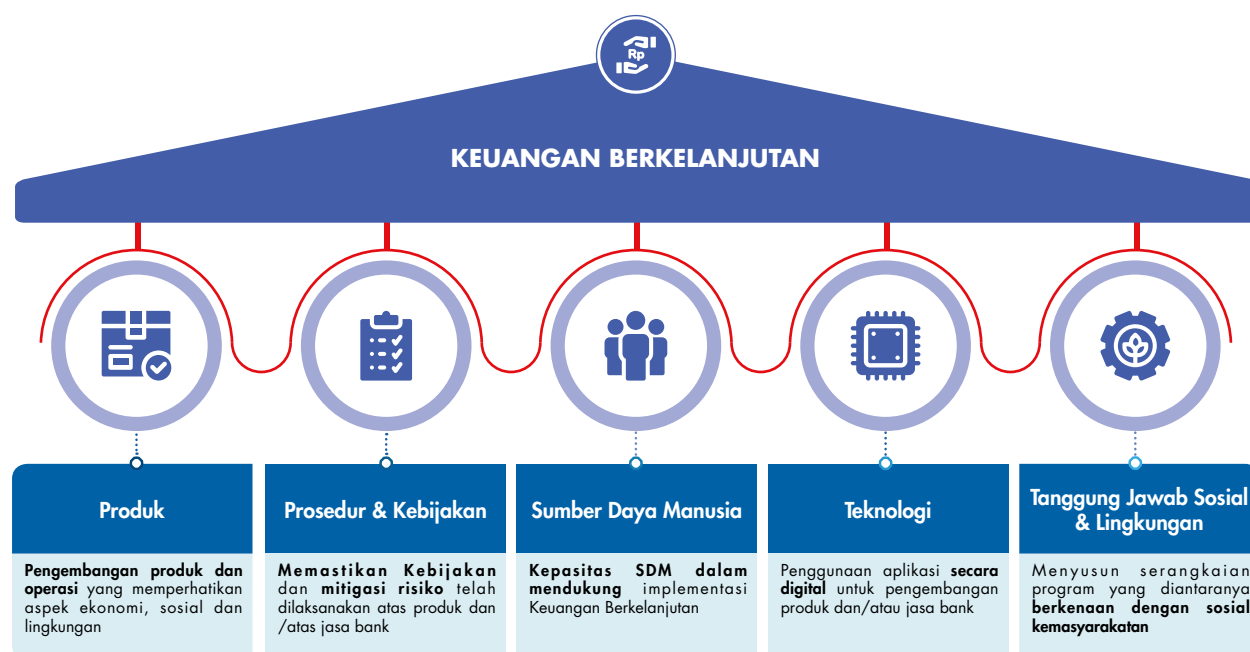
Perseroan senantiasa melakukan *monitoring* risiko kepatuhan (*Compliance Risk Monitoring*) antara lain melalui pengembangan *compliance dashboard*, pemenuhan aspek *Compliance Regulatory* terkait dengan ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan ISO 37301:2021 Sistem Manajemen Kepatuhan serta meningkatkan komitmen kepatuhan (*Compliance Commitment*) guna mendorong terwujudnya Budaya Kepatuhan (*Compliance Culture*) di semua tingkatan organisasi Perseroan.



Tahun 2023 Perseroan telah memiliki Penilaian *Self Assessment* iGRC yang terdiri dari Tata Kelola, Profil Risiko dan Rentabilitas dengan Penilaian *Self Assessment* iGRC. Selain itu, Perseroan telah mengembangkan iGRC ke tahap implementasi dengan memasukkan Program iGRC ke dalam Budaya Perusahaan dengan fokus pada Budaya Kepatuhan dan Budaya Risiko pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Perseroan melalui aktivitas secara berkelanjutan dan berkesinambungan.

- Kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Program Profesional Berintegritas (PROFIT) Sejak tahun 2019 Perseroan telah bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam gerakan Profesional Berintegritas (PROFIT) melalui kegiatan, yang meliputi: (1) keikutsertaan *training* sebagai Ahli Pembangun Integritas (API) untuk mengawal upaya pencegahan korupsi, (2) program kolaborasi kampanye dengan KPK tentang Anti Korupsi melalui berbagai saluran media komunikasi dan (3) *Self Assessment* atas daftar periksa panduan pencegahan korupsi yang memadai bagi korporasi, (4) Program Sertifikasi Penyuluh Anti Korupsi (PAKSI).
- Sertifikasi API
Sertifikasi API adalah personil bersertifikat yang berkompeten membangun sistem integritas yang berstandar nasional dalam upaya pemberantasan dan pencegahan korupsi yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) KPK. Pada tahun 2023 Perseroan berhasil melakukan sertifikasi Ahli Pembangun Integritas (API) Skema Utama dan Ahli Pembangun Integritas (API) Skema Muda sebanyak 26 orang sehingga total sejak tahun 2019 adalah 85 orang.
- Sertifikasi PAKSI
Perseroan dalam mendukung program dan upaya pencegahan korupsi dari KPK mengikuti PAKSI yang melibatkan pegawai Perseroan dan perwakilan IIKPA. Sampai dengan Tahun 2022 telah tersertifikasi PAKSI sebanyak 22 pegawai dan 5 IIKPA. Selanjutnya pada Tahun 2023 sebanyak 8 Pegawai BTN dan 1 orang dari IIKPA juga telah dinyatakan kompeten sebagai Penyuluh Antikorupsi oleh LSP KPK, sehingga total PAKSI Bank BTN sampai dengan Tahun 2023 sebanyak 36 orang. PAKSI adalah personil yang bersertifikat okupasi Penyuluh Antikorupsi dan mempunyai lingkup penyuluhan anti korupsi bidang tertentu serta diberi tugas oleh organisasinya untuk melakukan kegiatan penyuluhan anti korupsi pada lingkup organisasi dan jejaring organisasinya.

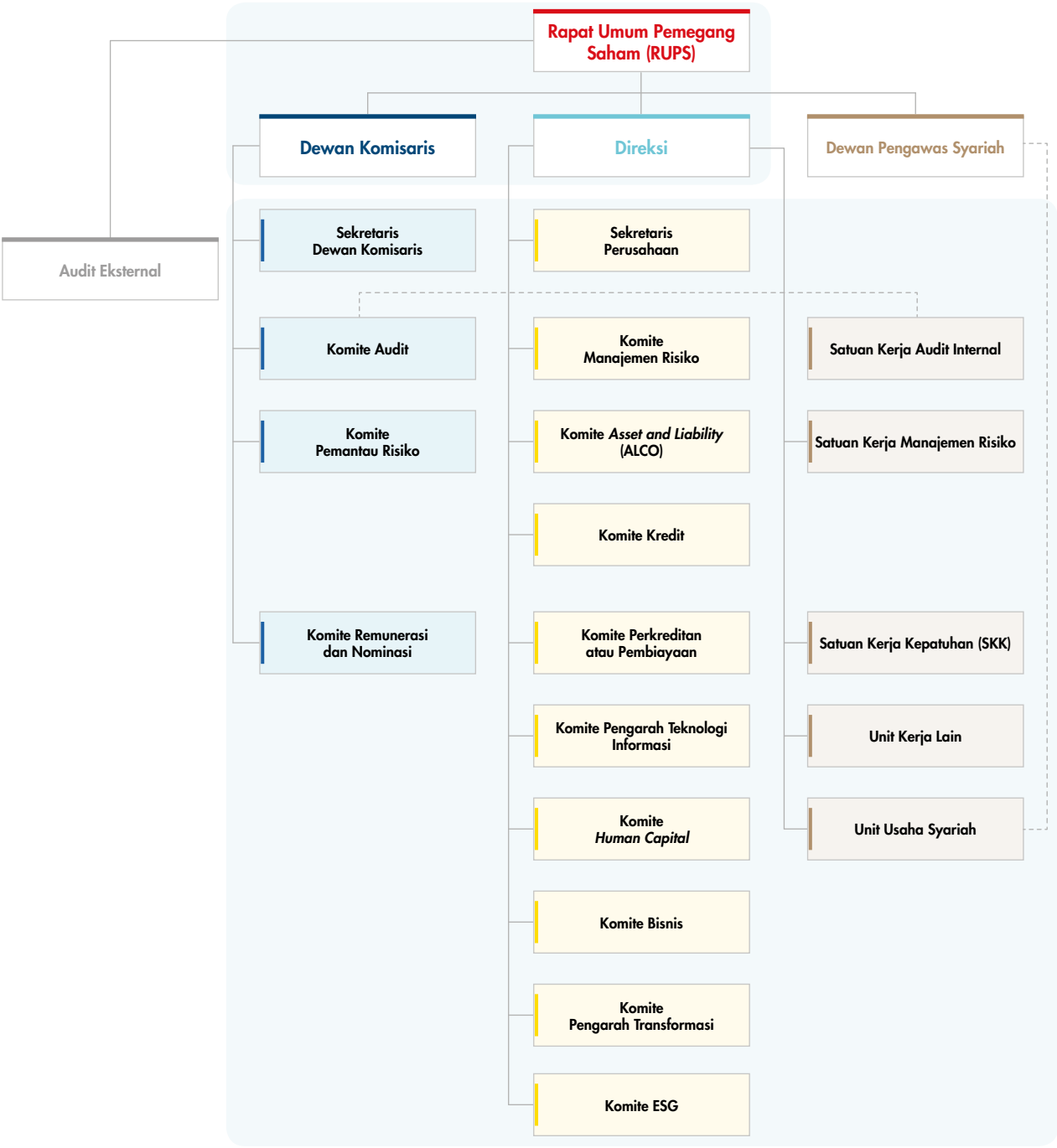
Pencapaian Program Keuangan Berkelanjutan 2023 dan Penerapan RAKB Bank BTN tahun 2022 dirumuskan ke dalam 5 (lima) Pilar Keuangan Berkelanjutan, yaitu:



Struktur dan Mekanisme Tata Kelola Perusahaan

Struktur Organ Perusahaan

Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007, menyebutkan bahwa Organ Perseroan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris. RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris saling menghormati tugas, tanggung jawab dan wewenang masing-masing sesuai peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. Organ Perseroan dibangun untuk menjamin pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan dapat berjalan dengan efektif dengan peran dan tanggung jawab yang jelas sehingga tercipta mekanisme kontrol *check and balance*.



Governance Soft Structure

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan cakupan implementasi tata kelola secara berkelanjutan, Perseroan Menyusun dan menerapkan *governance soft structure* yang mengatur hubungan antar organ di dalam Perseroan sehingga terdapat tugas, tanggung jawab dan wewenang yang jelas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, prinsip-prinsip GCG, etika bisnis yang sehat maupun *best practices*. *Governance soft structure* Perseroan merupakan tatanan kebijakan sebagai kerangka dasar dan tata kelola dalam penyusunan kebijakan serta pelaksanaan aktivitas Perseroan, sebagai berikut:

1. Anggaran Dasar Perseroan yang telah mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana diubah terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 28 tanggal 28 Maret 2023 dibuat oleh Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan yang telah mendapat persetujuan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0023685. AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 20 April 2023.
2. Tata Hubungan Kerja Dewan Komisaris dan Direksi yang disahkan dalam Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris Nomor 01/DEKOM-BTN/2021 dan Direksi Nomor 01/DIR-BTN/2021.
3. Pedoman GCG yang disahkan dalam Kebijakan Khusus Nomor KK.6-F tanggal 25 Agustus 2023 tentang Prosedur Tata Kelola Perusahaan *Good Corporate Governance* sebagaimana diperbarui pada tanggal 12 Desember 2023.
4. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris yang disahkan dalam Keputusan Dewan Komisaris Nomor 05/KOM-BTN/2023 sebagai pembaruan *Board Manual* yang menjadi pedoman kerja.
5. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi melalui Kebijakan Khusus Nomor KK.6-G tanggal 12 September 2023 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi.
6. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit Nomor 06/KOM/BTN/2023 tanggal 13 Desember 2023 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
7. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi Nomor 07/KOM/BTN/2023 tanggal 13 Desember 2023 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
8. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko Nomor 08/KOM/BTN/2023 tanggal 13 Desember 2023 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko.
9. Kebijakan Khusus Nomor KK.9-D tanggal 30 Maret 2023 tentang Prosedur Tata Kelola Komite Direksi
10. Kebijakan Khusus Nomor KK.6-A tanggal 25 April 2022 perihal Prosedur Pengendalian Gratifikasi dan Petunjuk Teknis Nomor PT.6-A.1 tanggal 25 April 2022 perihal Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi.

11. Pedoman Etika Bisnis dan Perilaku (*Code of Conduct*) yang disahkan melalui Peraturan Direksi Nomor 16/PD/CMPD/2015.
12. Kebijakan Khusus Nomor KK.6-H tanggal 10 Oktober 2023 perihal Prosedur Penanganan Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*).
13. Pedoman Pengelolaan *Whistleblowing System* melalui Petunjuk Teknis Nomor PT.7-B.2 tanggal 31 Oktober 2023 tentang Pengelolaan *Whistleblowing System*.
14. Kebijakan Khusus Nomor KK.6-F tanggal 28 Agustus 2023 tentang Prosedur Tata Kelola Perusahaan *Good Corporate Governance*.
15. Pembaruan KK Nomor KK.6-E tanggal 13 Desember 2023 tentang Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan (ISO 37001:2016).
16. Petunjuk Teknis Nomor PT.6-F.1 tanggal 15 September 2023 tentang Penilaian Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*).
17. Pembaruan Petunjuk teknis Nomor PT.6-E.1 tanggal 21 Desember 2023 tentang Prosedur pelaksanaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (ISO 37001: 2016).

Mekanisme Tata Kelola Perusahaan

Pemegang Saham

Sebagai salah satu Perseroan Badan Usaha Milik Negara berstatus perusahaan publik, kepemilikan saham terbesar Perseroan adalah Negara Republik Indonesia sebanyak 60,00% yang menempatkan Negara Republik Indonesia sebagai Pemegang Saham Pengendali. Selain itu, Negara Republik Indonesia juga memiliki 1 (satu) lembar Saham Seri A Dwiwarna yang memberikan kepada pemegangnya hak-hak istimewa yang tidak dimiliki oleh pemegang saham lainnya dan sekaligus sebagai Pemegang Saham Pengendali. Di luar itu, 40% saham Perseroan dimiliki oleh masyarakat. Daftar Pemegang Saham per tanggal 31 Desember 2023 adalah sebanyak 12.887.145.542 saham yang terdiri dari 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna dan 12.887.145.541 saham Seri B.

Hak Pemegang Saham

Perseroan memiliki 2 (dua) jenis saham yaitu Saham Seri A Dwiwarna dan Saham Seri B, dengan nilai nominal Rp500,- setiap saham. Pemegang Saham Seri A Dwiwarna merupakan pemegang saham pengendali dan memiliki keistimewaan dengan hak dan wewenang sebagai berikut:

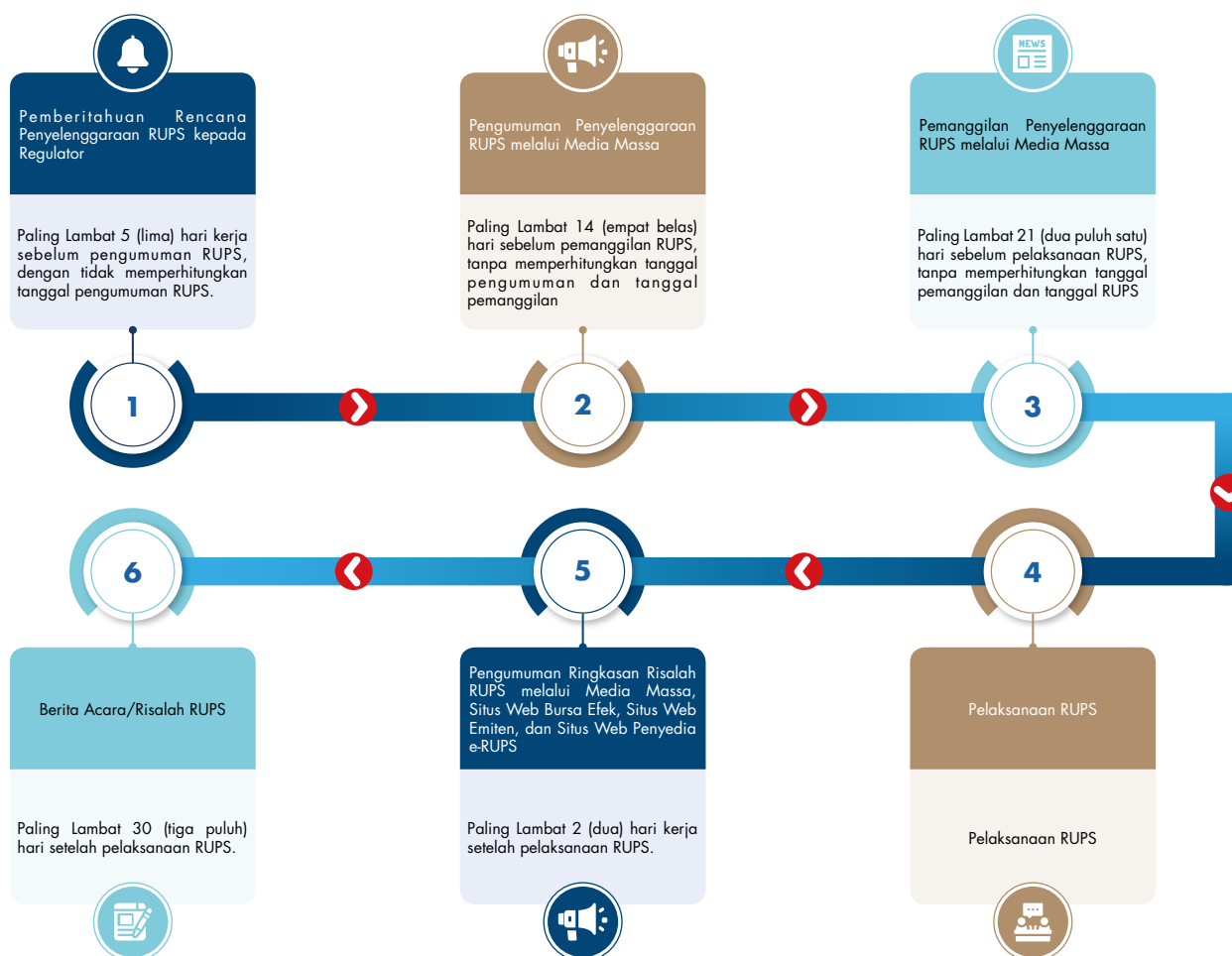
- Hak dan Wewenang Istimewa Pemegang Saham Seri A Dwiwarna
1. Hak untuk menyetujui dalam RUPS hal-hal sebagai berikut:
 - a. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar.
 - b. Persetujuan perubahan Permodalan.
 - c. Persetujuan Pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

- d. Persetujuan terkait penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan pembubaran.
 - e. Persetujuan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
 - f. Persetujuan pemindahtanganan aset yang berdasarkan Anggaran Dasar perlu persetujuan RUPS.
 - g. Persetujuan mengenai penyertaan dan pengurangan persentase penyertaan modal pada Perusahaan lain yang berdasarkan Anggaran Dasar perlu persetujuan RUPS.
 - h. Persetujuan penggunaan laba.
 - i. Persetujuan mengenai investasi dan pembiayaan jangka panjang yang tidak bersifat operasional yang berdasarkan Anggaran Dasar perlu persetujuan RUPS.
2. Hak untuk mengusulkan calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris.
 3. Hak untuk mengusulkan mata acara RUPS.
 4. Hak untuk meminta dan mengakses data dan dokumen Perseroan dengan mekanisme penggunaan hak dimaksud sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.
- Hak yang Sama Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan Pemegang Saham Seri B
1. Hak untuk menghadiri, menyampaikan pendapat, dan memberikan suara dalam RUPS berdasarkan satu saham, memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
 2. Hak untuk memperoleh informasi mengenai perusahaan secara tepat waktu, benar, dan teratur, kecuali hal-hal yang bersifat rahasia.
 3. Hak untuk menerima bagian dari keuntungan Perusahaan yang diperuntukan bagi Pemegang Saham dalam bentuk dividen dan pembagian keuntungan lainnya, sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki.
 4. Hak untuk memperoleh penjelasan lengkap dan informasi yang akurat mengenai prosedur yang harus dipenuhi berkenaan dengan penyelenggaraan RUPS.
 5. Dalam hal terdapat lebih dari satu jenis dan klasifikasi saham dalam Perusahaan, maka setiap pemegang saham berhak mengeluarkan suara sesuai dengan jenis, klasifikasi dan jumlah saham yang dimiliki, dan setiap pemegang saham berhak untuk diperlakukan setara berdasarkan jenis dan klasifikasi saham yang dimilikinya.
 6. Hak untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan lebih dari 50% dari jumlah nilai kekayaan bersih Perseroan baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain Direksi harus mendapat persetujuan RUPS.
 7. Hak untuk mengusulkan mata acara RUPS dengan rincian:
 - a. Pemegang saham Seri A Dwiwarna;
 - b. 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah.

Rapat Umum Pemegang Saham

Proses Penyelenggaraan RUPS dan Pemungutan Suara

Penyelenggaraan RUPS Perseroan mengacu pada Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Anggaran Dasar Perseroan. Adapun tahapan penyelenggaraan RUPS dilakukan sebagai berikut:



Untuk memberikan kesempatan kepada para pemegang saham individual maupun institusi untuk berpartisipasi aktif menggunakan haknya sebagai pemegang saham, maka Perseroan melakukan pengumuman dan pemanggilan RUPS dengan jangka waktu masing-masing, paling kurang melalui situs web Bursa Efek, situs web penyedia e-RUPS, dan situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS. Tempat penyelenggaraan RUPS wajib dilakukan di wilayah Republik Indonesia, yaitu dapat diadakan di:

1. Tempat kedudukan Perseroan.
2. Tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya.
3. Ibu kota provinsi tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan.
4. Provinsi tempat kedudukan Bursa Efek yang mencatatkan saham Perseroan.

Mekanisme pemungutan suara dalam RUPS telah dicantumkan dalam Tata Tertib dan Prosedur RUPS pada *website* Perseroan saat pemanggilan RUPS. Demikian pula dengan penjelasan untuk masing-masing mata acara RUPS telah dicantumkan pada pemanggilan RUPS yang disampaikan melalui *website* Perseroan.

Pimpinan RUPS

RUPS dipimpin oleh Pimpinan RUPS dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pimpinan RUPS adalah anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
2. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.



3. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir, RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
4. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
5. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
6. Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan.
7. Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.
8. Pimpinan RUPS berhak meminta agar mereka yang hadir membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam RUPS tersebut dan/atau meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya. Surat kuasa dapat diakses melalui *website* Perseroan pada bagian Hubungan Investor - RUPS - Pemanggilan RUPS.
9. Pimpinan RUPS berhak mengambil langkah yang dianggap perlu agar RUPS dapat berjalan dengan lancar dan tertib sehingga dapat memenuhi tujuannya.

Kuorum RUPS

Berdasarkan Anggaran Dasar, kuorum kehadiran dan keputusan RUPS terhadap hal yang harus diputuskan dalam Rapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan:

1. Dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat kecuali Undang-Undang dan/atau Anggaran Dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.
2. Dalam hal kuorum kehadiran tidak tercapai, maka RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat kecuali Undang-Undang dan/atau Anggaran Dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.
3. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak

suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan persyaratan pengambilan keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

Kuorum sebagaimana dimaksud pada butir di atas menyesuaikan mata acara RUPS sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku.

Prosedur Tata Tertib Tanya Jawab RUPS

Dalam pembahasan masing-masing mata acara RUPS, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham yang berhak atau kuasanya untuk menyampaikan pertanyaan/pendapat/usul secara tertulis sebelum diadakan pemungutan suara dan setelah pembahasan mata acara RUPS.

Prosedur yang akan ditempuh:

1. Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya yang sah untuk bertanya, menyatakan pendapat dan/atau menyampaikan usul. Pada setiap sesi tanya jawab, akan diberi kesempatan kepada 3 (tiga) Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya yang sah untuk mengajukan pertanyaan/pendapat/usul secara tertulis. Dengan mempertimbangkan pertanyaan/pendapat/usul yang telah diajukan, Pimpinan Rapat dapat membatasi jumlah pertanyaan/pendapat/usul yang disampaikan.
2. Hanya Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya yang sah yang berhak untuk mengajukan pertanyaan, menyatakan pendapat dan/atau menyampaikan usul.
3. Para Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya yang sah yang ingin mengajukan pertanyaan, menyatakan pendapat dan/atau menyampaikan usul diminta untuk mengangkat tangan, dan selanjutnya petugas Rapat akan menyerahkan kepada mereka formulir pertanyaan/pendapat/usul untuk diisi nama Pemegang Saham Yang Berhak, jumlah saham yang dimiliki/diwakili dan pertanyaan/pendapat/usul yang diajukan. Formulir pertanyaan/pendapat/usul tersebut harus diserahkan kepada petugas Rapat untuk disampaikan kepada Pimpinan Rapat dengan terlebih dahulu divalidasi oleh Notaris.
4. Setiap pertanyaan/pendapat/usul yang diajukan oleh Pemegang Saham Yang Berhak harus memenuhi syarat bahwa menurut pendapat Pimpinan Rapat hal tersebut berhubungan langsung dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan.
5. Pimpinan Rapat akan membacakan pertanyaan/pendapat/usul yang diajukan dan menanggapi pertanyaan/pendapat/usul tersebut satu per satu. Bilamana diperlukan, Pimpinan Rapat akan mempersilahkan anggota Direksi atau Dewan Komisaris Perseroan atau Lembaga dan/atau Profesi Penunjang untuk menjawab atau menanggapi pertanyaan/pendapat/usul tersebut.
6. Setelah seluruh pertanyaan/pendapat/usul dijawab atau ditanggapi, akan dilakukan pemungutan suara, hanya Pemegang Saham yang Berhak atau kuasanya yang sah yang berhak untuk mengeluarkan suara.

Pelaksanaan RUPS Tahunan 2023 dan Realisasinya

Tahapan	Uraian
Pemberitahuan	Surat Nomor 151/DIR/CSD/I/2023 tanggal 26 Januari 2023 Perihal Penyampaian Tanggal Pelaksanaan dan Mata Acara RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk disampaikan kepada OJK dengan tembusan PT Bursa Efek Indonesia, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, PT Datindo Entrycom, dan Dewan Komisaris Perseroan
Pengumuman	Dipublikasikan melalui situs web penyedia e-RUPS, situs website Bursa Efek Indonesia, dan situs website Perseroan pada tanggal 7 Februari 2023.
Pemanggilan	Dipublikasikan melalui situs web penyedia e-RUPS, situs website Bursa Efek Indonesia, dan situs website Perseroan pada tanggal 22 Februari 2023.
Pelaksanaan	RUPS dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023 pukul 14.33 WIB – 17.18 WIB bertempat di Gedung Menara BTN, lantai 6 Jl. Gajah Mada No. 1 Jakarta Pusat 10130.
Pengumuman Ringkasan Risalah RUPS	Dipublikasikan melalui situs web penyedia e-RUPS, situs website Bursa Efek Indonesia, dan situs website Perseroan pada tanggal 17 Maret 2023.
Berita Acara RUPS	Surat Nomor 508/CSD/RCD/IV/2023 tanggal 12 April 2023 Perihal Penyampaian Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun 2023 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk disampaikan kepada OJK pada tanggal 12 April 2023.

Rekapitulasi Kehadiran Pada RUPS Tahunan 2023

Rapat dipimpin oleh Sdr. Chandra M. Hamzah, selaku Komisaris Utama/Independen, sesuai keputusan Rapat Dewan Komisaris tanggal 08 Maret 2023 yang disampaikan melalui surat Dewan Komisaris Nomor 46/KOM/BTN/III/2023 tanggal 08 Maret 2023 perihal Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, dan dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris, seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Komite Audit Perseroan sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Kehadiran
1.	Chandra M. Hamzah	Komisaris Utama/Independen	Hadir
2.	Iqbal Latanro	Wakil Komisaris Utama/Independen	Hadir
3.	Ahdi Jumhari Luddin*	Komisaris Independen	Hadir
4.	Armand B. Arief	Komisaris Independen	Hadir
5.	Sentot A. Sentausa	Komisaris Independen	Hadir
6.	Andin Hadiyanto	Komisaris	Hadir
7.	Herry Trisaputra Zuna*	Komisaris	Hadir
8.	Himawan Arief Sugoto	Komisaris	Hadir
9.	Mohamad Yusuf Permana*	Komisaris	Hadir
10.	Haru Koesmahargyo	Direktur Utama	Hadir
11.	Nixon L.P. Napitupulu	Wakil Direktur Utama	Hadir
12.	Andi Nirwoto	Direktur IT and Digital	Hadir
13.	Elisabeth Novie Riswanti	Direktur Assets Management	Hadir
14.	Jasmin	Direktur Distribution and Funding	Hadir
15.	Setiyo Wibowo	Direktur Risk Management	Hadir
16.	Hirwandi Gafar	Direktur Consumer	Hadir
17.	Nafry Rony Poetra	Direktur Finance	Hadir
18.	Eko Waluyo	Direktur Human Capital, Compliance, and Legal	Hadir
19.	Endang A. Suprijatna	Anggota Komite Audit	Hadir
20.	Peter Eko Budi Darwito	Anggota Komite Audit	Hadir

* Hadir dalam Rapat melalui video telekonferensi.

Pihak Independen Penghitung Suara

Hasil pengambilan keputusan dihitung oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek (BAE) dan selanjutnya divalidasi oleh Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn, yang keduanya ditunjuk oleh Perseroan.

Keputusan dan Realisasi RUPS Tahunan 2023

Agenda Pertama

Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2022 sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan yang Telah Dijalankan Selama Tahun Buku 2022.

No.	Tanggapan/Pertanyaan	Jawaban
1.	Dalam rangka peningkatan kinerja Perseroan dan efektivitas pembinaan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ("BTN"), bersama ini kami sampaikan tanggapan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna sebagai berikut: - Atas capaian kinerja Perseroan pada Tahun Buku 2022, kami ucapkan terima kasih dan apresiasi kepada segenap jajaran Dewan Komisaris, Direksi, dan Pegawai BTN atas: - Peningkatan capaian kinerja dan komitmen Perseroan dalam menjaga <i>sustainability</i> Bank di tengah pelemahan ekonomi global paska pandemi Covid-19 antara lain: - Laba Bersih Perseroan meningkat 28,14% yoy atau tercapai sebesar Rp3.045 miliar. - Total kredit tumbuh 8,53% yoy dari Rp274,8 triliun menjadi Rp298,3 triliun. - Dana Pihak Ketiga tumbuh 8,77% dari capaian sebesar Rp296,0 triliun pada tahun 2021 naik menjadi Rp321,9 triliun pada tahun 2022. - Cost of Fund membaik dari 3,13% menjadi 2,60%. - Efisiensi biaya yang ditunjukkan dengan turunnya rasio BOPO dari 89,28% menjadi 86,00%. - Capaian kinerja tersebut hendaknya ditingkatkan pada periode berikutnya sehingga perusahaan dapat berkontribusi lebih optimal terhadap <i>shareholder return</i>. - Keberhasilan Perseroan dalam pelaksanaan <i>Rights Issue</i> dengan kelebihan permintaan (<i>oversubscribed</i>) untuk porsi pemegang saham publik menjadi 1,6 kali. Hal ini menunjukkan kepercayaan para investor terhadap prospek kinerja BTN ke depan yang diharapkan dapat terus tumbuh dan berkelanjutan melalui peningkatan kapasitas penyaluran pembiayaan perumahan di Indonesia. - Hal-hal yang perlu mendapat perhatian Dewan Komisaris dan Direksi BTN untuk perbaikan kinerja di masa mendatang sebagai berikut: - Mengantisipasi kondisi ketidakpastian perekonomian global tahun 2023 yang menimbulkan potensi penurunan demand kredit, <i>trend</i> kenaikan suku bunga serta tekanan inflasi, Perseroan agar menetapkan strategi penyaluran kredit yang lebih selektif, menerapkan manajemen risiko kredit yang berkesinambungan, serta pengelolaan likuiditas yang optimal.	Terimakasih Pemegang Saham Seri A Dwiwarna atas tanggapannya. Perseroan akan mencatat dan menindaklanjuti catatan dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.

No.	Tanggapan/Pertanyaan	Jawaban
	b. Mengantisipasi penurunan kualitas kredit akibat berakhirnya masa relaksasi, Perseroan agar menjaga <i>coverage ratio</i> yang memadai melalui pembentukan CKPN dengan memperhatikan kondisi internal dan eksternal yang valid dan relevan, serta kemungkinan penurunan kualitas portofolio kredit di luar prediksi. Pengalaman +/-3 (tiga) tahun masa pandemi, diharapkan dapat menjadi <i>lesson learned</i> bagi BTN dalam menetapkan strategi dan pengelolaan risiko bisnis di masa mendatang. c. Mempertajam strategi dalam penurunan <i>cost of fund</i> dengan fokus pada <i>low cost funding</i> pada produk dana murah (CASA) melalui layanan yang optimal bagi nasabah dan dukungan <i>e-channel</i> yang andal serta melakukan re-negosiasi dan <i>reprofiling</i> tingkat bunga nasabah 50 Deposan Inti saat perpanjangan untuk menjaga biaya dana pada tingkat yang optimal. Pengembangan <i>e-channel</i> agar fokus pada <i>most valuable product</i> (MVP) yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah dan senantiasa dilakukan monitor terhadap kesesuaian antara pencapaian benefit yang telah dijanjikan dengan target kualitas dan waktu yang telah ditentukan. d. Mengembangkan strategi di segmen transaksi retail, transaksi <i>e-channel</i>, dan <i>digital mortgage</i> sebagai upaya peningkatan perolehan <i>fee-based income</i> sehingga mampu menciptakan <i>competitive advantage</i> di segmen pembiayaan properti dan perumahan. e. Menjaga komitmen dalam mengembangkan inisiatif ESG antara lain melalui program kerja Perseroan, penyaluran kredit maupun penerbitan surat utang dengan berlandaskan pada prinsip <i>green financing</i>. f. Menyelesaikan tindak lanjut temuan audit/pemeriksaan internal maupun eksternal, mengoptimalkan efektivitas implementasi <i>three lines of defense</i> dalam operasional Perseroan, serta senantiasa mengedepankan prinsip <i>good corporate governance</i> dan ketentuan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT).	
2.	1. Bagaimana sinergi akuisisi <i>High Yield Loan</i> (KTA) dan <i>payroll</i> untuk peningkatan CASA? 2. Apakah NIM bisa dijaga pada kisaran 4% dengan <i>Cost of Credit/Cost of Fund</i> yang meningkat?	1. Perseroan memiliki <i>opportunity</i> 600.000 potensial <i>customer</i> yang dapat ditawarkan kredit <i>top up</i> dengan margin yang lebih tinggi (KUR, KAR, dan KRING). Saat ini Perseroan sedang melakukan uji coba dengan proses yang lebih simpel dan cepat dengan teknologi Teken Aja, yang tidak melalui proses pengajuan, namun dengan penawaran. Proses ini sedang dalam proses finalisasi dan akan segera dilakukan <i>roll out</i>, karena diharapkan dapat meningkatkan kredit bermargin tinggi. 2. Terkait CASA, saat ini Perseroan sedang mengembangkan beberapa produk tabungan, yaitu BTN Bisnis. Produk BTN Bisnis ini terus dikejar pertumbuhannya, hingga per tanggal 31 Desember 2022 telah terkumpul Rp2 triliun. Strategi ini sejalan dengan usaha yang dilakukan oleh Perseroan untuk terus meningkatkan <i>value chain</i> terkait bisnis perumahan 3. NIM tetap akan dijaga sekitar 4% - 4,4%. Perseroan memiliki beberapa produk kredit bermargin tinggi yaitu KPR BTN Subsidi Selisih Bunga (SSB).

No.	Tanggapan/Pertanyaan	Jawaban
3.	Laba Perseroan sebesar Rp3,04 triliun karena menyangkut beberapa akun pinjaman yang dipertanyakan oleh Pemegang Saham.	Mata acara pertama Rapat adalah terkait laporan keuangan yang telah memperhatikan kaidah akuntansi dan telah di audit oleh pihak independen Kantor Akuntan Publik (KAP). Sebelum memberikan opini audit, KAP telah berdiskusi dengan regulator. Hal lainnya tidak terkait langsung dengan mata acara Rapat.

Terdapat 3 (tiga) pemegang saham yang mengajukan pertanyaan, pendapat, dan/atau usul sehubungan dengan Mata Acara Pertama Rapat.

Hasil Pemungutan Suara

Setuju : 10.356.519.438 (99,4981302%)
 Tidak Setuju : 21.062 (0,0002023%)
 Abstain : 52.217.346 (0,5016674%)

Keputusan

- Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2022 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
- Mengesahkan:
 - Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2022 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja sesuai Laporan Nomor 00082/2.1032/AU.1/07/0240-3/1/II/2023 tanggal 17 Februari 2023.
 - Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk Tahun Buku 2022 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja sesuai Laporan Nomor 00083/2.1032/AU.2/07/0240-2/1/II/2023 tanggal 17 Februari 2023, keduanya dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material.
- Dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan disahkannya Laporan Keuangan Perseroan serta Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK), seluruhnya untuk Tahun Buku 2022 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, maka RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2022 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam laporan tersebut di atas.

Status: Terealisasi/Terlaksana

Agenda Kedua

Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2022

Terdapat 1 (satu) pemegang saham yang mengajukan pertanyaan, pendapat, dan/atau usul, namun berisi sikap yang akan diputuskan dalam pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara

Setuju : 10.403.502.187 (99,9495073%)
 Tidak Setuju : 21.062 (0,0002023%)
 Abstain : 5.234.597 (0,0502903%)

Keputusan

Menyetujui dan menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2022 sebesar Rp3.045.071.859.198,- (tiga triliun empat puluh lima miliar tujuh puluh satu juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh delapan Rupiah) sebagai berikut:

- Sebesar 20% (dua puluh persen) atau Rp609.014.371.840,- (enam ratus sembilan miliar empat belas juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus empat puluh Rupiah) sebagai Dividen Tunai kepada para pemegang saham yang akan dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Dividen bagian Pemerintah Republik Indonesia atas kepemilikan 60% (enam puluh persen) saham sebesar Rp365.408.623.104,- (tiga ratus enam puluh lima miliar empat ratus delapan juta enam ratus dua puluh tiga ribu seratus empat Rupiah), akan disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara dalam mata uang Rupiah.
 - Dividen pemegang saham lainnya atas kepemilikan 40% (empat puluh persen) saham publik sebesar Rp243.605.748.736,- (dua ratus empat puluh tiga miliar enam ratus lima puluh tujuh ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh enam Rupiah) akan dibayarkan kepada pemegang saham secara proporsional sesuai dengan kepemilikan saham.
 - Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen Tahun Buku 2022 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Sebesar 80% (delapan puluh persen) atau Rp2.436.057.487.358,- (dua triliun empat ratus tiga puluh enam miliar lima puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh delapan Rupiah) sebagai saldo Laba Ditahan.

Status: Terealisasi/Terlaksana

Agenda Ketiga

Penetapan remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) Tahun 2023 dan Tantiem Tahun Buku 2022 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Tidak terdapat penanya dalam pembahasan mata acara ketiga Rapat

Hasil Pemungutan Suara

Setuju : 10.403.002.553 (99,9447072%)
 Tidak Setuju : 531.596 (0,0051072%)
 Abstain : 5.223.697 (0,0501856%)

Keputusan

- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna Perseroan untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2022 dan gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan untuk Tahun 2023 bagi anggota Dewan Komisaris.
- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna Perseroan untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2022 dan gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan untuk Tahun 2023 bagi anggota Direksi.

Status: Terealisasi/Terlaksana

Agenda Keempat

Penunjukan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku 2023.

Tidak terdapat penanya dalam pembahasan mata acara keempat Rapat

Hasil Pemungutan Suara

Setuju : 9.952.426.675 (95,6158921%)
 Tidak Setuju : 451.099.682 (4,3338474%)
 Abstain : 5.231.489 (0,0502605%)

Keputusan

1. Menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young Global Limited) sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan serta Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) dan laporan lainnya untuk Tahun Buku 2023.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan periode lainnya pada Tahun Buku 2023 untuk tujuan dan kepentingan Perseroan.
3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan imbal jasa audit dan persyaratan lainnya bagi KAP tersebut, serta menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young Global Limited) karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan serta Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku 2023, termasuk menetapkan imbal jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut.

Status: Terealisasi/Terlaksana

Agenda Kelima

Persetujuan atas Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) Perseroan.

Tidak terdapat penanya dalam pembahasan mata acara kelima Rapat.

Hasil Pemungutan Suara

Setuju : 10.403.476.130 (99,9492570%)
 Tidak Setuju : 38.600 (0,0003708%)
 Abstain : 5.243.116 (0,0503722%)

Keputusan

Menyetujui Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) Tahun 2022-2024 yang telah disusun oleh Perseroan sesuai Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Resolusi Bagi Bank Umum.

Status: Terealisasi/Terlaksana

Agenda Keenam

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Bank BTN Tahap II Tahun 2022 dan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Penawaran Umum Terbatas II (PMHMETD II).

Mata acara Rapat keenam bersifat laporan sehingga tidak dilakukan sesi tanya jawab.

Hasil Pemungutan suara

Mata acara Rapat keenam bersifat laporan sehingga tidak dilakukan pengambilan keputusan.

Keputusan

Mata acara Rapat keenam bersifat laporan sehingga tidak dilakukan pengambilan keputusan.

Status: Terealisasi/Terlaksana

Agenda Ketujuh

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Tidak terdapat penanya dalam pembahasan mata acara ketujuh Rapat.

Hasil Pemungutan Suara

Setuju : 9.301.715.765 (89,3643209%)
 Tidak Setuju : 1.101.810.492 (10,5854177%)
 Abstain : 5.231.589 (0,0502614%)

Keputusan

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka:
 - a. Penyesuaian ketentuan terkait kegiatan usaha Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengacu kepada Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, dan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.
 - b. Penyempurnaan Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 keputusan tersebut di atas.
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu Akta Notaris dan memberikan kuasa dengan hak substitusi untuk menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

Status: Terealisasi/Terlaksana

Agenda Kedelapan

Perubahan Susunan dan Penetapan Remunerasi Dewan Pengawas Syariah UUS Perseroan.

Tidak terdapat penanya dalam pembahasan mata acara kedelapan Rapat.

Hasil Pemungutan Suara

Setuju : 9.272.476.500 (89,0834107%)
Tidak Setuju : 1.131.049.757 (10,8663279%)
Abstain : 5.231.589 (0,0502614%)

Keputusan

1. Menyetujui dan mengesahkan pemberhentian dengan hormat Sdr. Muhammad Quraish Shihab sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah Perseroan dan Sdr. Mohamad Hidayat sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan, dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikirannya selama memangku jabatannya tersebut.
2. Menyetujui dan mengesahkan pengangkatan kembali Sdr. Muhammad Quraish Shihab sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk periode kedua dan akan efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
3. Berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan sebagaimana dimaksud pada butir kedua di atas adalah sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-5 sejak pengangkatan yang bersangkutan yaitu RUPS yang diselenggarakan tahun 2028, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
4. Menyetujui pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk mengangkat Anggota Dewan Pengawas Syariah lainnya apabila diperlukan untuk melengkapi susunan Anggota Dewan Pengawas Syariah dan menetapkan remunerasi Dewan Pengawas Syariah Perseroan dalam rangka pengawasan kegiatan usaha Perseroan berdasarkan prinsip syariah.
5. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan susunan Dewan Pengawas Syariah Perseroan kepada Menteri Hukum dan HAM.

Status: Terealisasi/Terlaksana

Agenda Kesembilan

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Tidak terdapat penanya dalam pembahasan mata acara kesembilan Rapat

Hasil Pemungutan Suara

Setuju : 9.268.759.831 (89,0477036%)
Tidak Setuju : 1.134.636.387 (10,9007857%)
Abstain : 5.361.628 (0,0515107%)

Keputusan

1. Memberhentikan dengan hormat Sdr. Haru Koesmahargyo sebagai Direktur Utama Perseroan yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2020 tanggal 10 Maret 2021, terhitung sejak ditutupnya RUPS, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Pengurus Perseroan.
2. Mengalihkan penugasan Sdr. Nixon L. P. Napitupulu yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 Tanggal 2 Maret 2022, semula sebagai Wakil Direktur Utama menjadi Direktur Utama Perseroan, dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan sesuai dengan Keputusan RUPS pengangkatan yang bersangkutan.
3. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:
 - a. Sdr. Oni Febriarto Rahardjo - sebagai Wakil Direktur Utama;
 - b. Sdr. Hakim Putratama - sebagai Direktur Institutional Banking
4. Masa jabatan anggota-anggota Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 3, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
5. Dengan adanya pemberhentian, pengalihan tugas dan pengangkatan anggota-anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 3, maka susunan keanggotaan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:
 - a. Direktur Utama : Nixon L.P. Napitupulu
 - b. Wakil Direktur Utama : Oni Febriarto Rahardjo
 - c. Direktur Finance : Nofry Rony Poetra
 - d. Direktur Assets Management : Elisabeth Novie Riswanti
 - e. Direktur Human Capital, Compliance, & Legal : Eko Waluyo
 - f. Direktur Risk Management : Setiyo Wibowo
 - g. Direktur Distribution & Funding : Jasmin
 - h. Direktur IT & Digital : Andi Nirwoto
 - i. Direktur Consumer : Hirwandi Gafar
 - j. Direktur Institutional Banking : Hakim Putratama
6. Anggota Direksi yang dialih tugaskan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 3 baru dapat melaksanakan tugasnya setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit & Proper Test*) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal anggota Direksi Perseroan kemudian dinyatakan tidak disetujui sebagai anggota Direksi dalam Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit & Proper Test*) oleh OJK, maka anggota Direksi Perseroan tersebut diberhentikan dengan hormat sejak tanggal ditetapkannya keputusan hasil *Fit & Proper Test* OJK dimaksud.
7. Anggota Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 3 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.
8. Meminta kepada Direksi untuk mengajukan permohonan tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk pelaksanaan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) atas anggota Direksi yang dialih tugaskan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 3.
9. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan RUPS ini dalam bentuk Akta Notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan rapat.

Status: Terealisasi/Terlaksana

Pelaksanaan RUPS Luar Biasa 2023 dan Realisasinya

Tahapan	Uraian
Pemberitahuan	Surat Nomor 704/DIR/CSD/XI/2022 tanggal 24 November 2022 Perihal Penyampaian Tanggal Pelaksanaan dan Mata Acara RUPS Luar Biasa PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk disampaikan kepada OJK dengan tembusan PT Bursa Efek Indonesia, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, PT Datindo Entrycom, dan Dewan Komisaris Perseroan.
Pengumuman	Dipublikasikan melalui situs web penyedia e-RUPS, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan pada tanggal 5 Desember 2022.
Pemanggilan	Dipublikasikan melalui situs web penyedia e-RUPS, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan pada tanggal 20 Desember 2022.
Pelaksanaan	RUPS dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023 pukul 14.36 WIB – 15.10 WIB bertempat di Gedung Menara BTN, lantai 6 Jl. Gajah Mada No. 1 Jakarta Pusat 10130.
Pengumuman Ringkasan Risalah RUPS	Dipublikasikan melalui situs web penyedia e-RUPS, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan pada tanggal 12 Januari 2023.
Berita Acara RUPS	Surat Nomor 91/CSD/RCD/II/2023 tanggal 3 Februari 2023 Perihal Penyampaian Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Tahun 2023 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk disampaikan kepada OJK pada tanggal 3 Februari 2023.

Rekapitulasi Kehadiran Pada RUPS Luar Biasa 2023

RUPS Luar Biasa tahun 2023 dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris, seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Komite Audit Perseroan sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Kehadiran
1.	Chandra Hamzah	Komisaris Utama/Independen	Hadir
2.	Iqbal Latanro	Wakil Komisaris Utama/Independen	Hadir
3.	Ahdi Jumhari Luddin	Komisaris Independen	Hadir
4.	Armand B. Arief	Komisaris Independen	Hadir
5.	Sentot A. Sentausa	Komisaris Independen	Hadir
6.	Andin Hadiyanto	Komisaris	Hadir
7.	Herry Trisaputra Zuna	Komisaris	Hadir
8.	Himawan Arief Sugoto	Komisaris	Hadir
9.	Haru Koesmahargyo	Direktur Utama	Hadir
10.	Nixon L.P. Napitupulu	Wakil Direktur Utama	Hadir
11.	Nofry Rony Poetra	Direktur Finance	Hadir
12.	Eko Waluyo	Direktur Human Capital, Compliance and Legal	Hadir
13.	Setiyo Wibowo	Direktur Risk Management	Hadir
14.	Jasmin	Direktur Distribution and Funding	Hadir
15.	Andi Nirwoto	Direktur IT and Digital	Hadir
16.	Hirwandi Gafar	Direktur Consumer	Hadir
17.	Elisabeth Novie Riswanti	Direktur Assets Management	Hadir
18.	Adi Prakoso	Anggota Komite Audit	Hadir
19.	Peter Eko Budi Darwito	Anggota Komite Audit	Hadir

Pihak Independen Penghitung Suara

Perhitungan suara dilakukan pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan yaitu PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek dan selanjutnya divalidasi oleh Notaris Yumna Shabrina, S.H. M.Kn. sebagai Notaris Pengganti dari Ashoya Ratam, SH, M.Kn.

Keputusan dan Realisasi RUPS Luar Biasa 2023

Agenda

Persetujuan atas Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Tidak terdapat penanya dalam pembahasan Mata Acara Rapat.

Hasil Pemungutan suara

Setuju : 6.571.532.367 (88,5436487%)
Tidak Setuju : 826.139.714 (11,1312584%)
Abstain : 24.127.749 (0,3250930%)

Keputusan

1. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Sdr. Heru Budi Hartono sebagai Komisaris Perseroan yang diangkat berdasarkan RUPSLB 2019 Tanggal 27 November 2019, terhitung sejak tanggal 17 Oktober 2022, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Komisaris Perseroan.
1. Mengangkat Sdr. Mohamad Yusuf Permana sebagai Komisaris Perseroan.
2. Memberhentikan dengan hormat Sdr. Andi Nirwoto sebagai Direktur IT & Digital yang diangkat berdasarkan RUPS Tahun 2018 Tanggal 23 Maret 2018 jo. RUPSLB Tahun 2019 tanggal 27 November 2019 jo. RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 tanggal 02 Maret 2022, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Pengurus Perseroan.
3. Mengangkat Sdr. Andi Nirwoto sebagai Direktur IT & Digital.
4. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan 4, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
5. Dengan adanya pengukuhan pemberhentian, pemberhentian, dan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2, 3, dan 4, maka susunan keanggotaan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:
 - a. Dewan Komisaris
 - Komisaris Utama/Komisaris Independen : Chandra Hamzah
 - Wakil Komisaris Utama/Komisaris independen : Iqbal Latanro
 - Komisaris : Andin Hadiyanto
 - Komisaris : Herry Trisaputra Zuna
 - Komisaris : Himawan Arief Sugoto
 - Komisaris : Mohamad Yusuf Permana
 - Komisaris Independen : Armand B. Arief
 - Komisaris Independen : Ahdi Jumhari Luddin
 - Komisaris Independen : Sentot A. Sentausa
 - b. Direksi
 - Direktur Utama : Haru Koesmahargyo
 - Wakil Direktur Utama : Nixon L.P. Napitupulu
 - Direktur Finance : Nofry Rony Poetra
 - Direktur Assets Management : Elisabeth Novie Riswanti
 - Direktur Human Capital, Compliance, & Legal : Eko Waluyo
 - Direktur Risk Management : Setiyo Wibowo
 - Direktur Distribution & Funding : Jasmin
 - Direktur IT & Digital : Andi Nirwoto
 - Direktur Consumer : Hirwandi Gafar
6. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan 4 baru dapat melaksanakan tugasnya setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit & Proper Test*) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal Dewan Komisaris atau Direksi Perseroan kemudian dinyatakan tidak disetujui sebagai anggota Dewan Komisaris atau Direksi dalam Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit & Proper Test*) oleh OJK, maka anggota Dewan Komisaris atau Direksi Perseroan tersebut diberhentikan dengan hormat sejak tanggal ditetapkannya keputusan hasil *Fit & Proper Test* OJK dimaksud.
7. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan 4 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan anggota Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.
8. Meminta kepada Direksi untuk mengajukan permohonan tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk pelaksanaan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) atas anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan 4.
9. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan RUPS ini dalam bentuk Akta Notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan rapat.

Status: Terealisasi/Terlaksana

Pelaksanaan RUPS Tahunan 2022 dan Realisasinya

Tahapan	Uraian
Pemberitahuan	Surat Nomor 07/DIR/CSD/I/2022 tanggal 12 Januari 2022 Perihal Pemberitahuan Tanggal Pelaksanaan dan Mata Acara RUPS Tahunan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk disampaikan kepada OJK dengan tembusan PT Bursa Efek Indonesia, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, dan PT Datindo Entrycom.
Pengumuman	Dipublikasikan melalui situs web penyedia e-RUPS, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan pada hari Senin, tanggal 24 Januari 2022.
Pemanggilan	Dipublikasikan melalui situs web penyedia e-RUPS, situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan, dan surat kabar harian Bisnis Indonesia pada hari Selasa, tanggal 8 Februari 2022.
Pelaksanaan	RUPS dilaksanakan pada hari Rabu, Tanggal 2 Maret 2022 pukul 10.36 WIB – 14.08 WIB bertempat di Gedung Menara BTN, lantai 6 Jl. Gajah Mada No. 1 Jakarta Pusat 10130.
Pengumuman Ringkasan Risalah RUPS	Dipublikasikan melalui situs web penyedia e-RUPS, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan pada tanggal 4 Maret 2022.
Berita Acara RUPS	Surat Nomor 175/CSD/CMA/III/2022 tanggal 28 Maret 2022 Perihal Penyampaian Akta Risalah RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk disampaikan kepada OJK dengan tembusan PT Bursa Efek Indonesia pada tanggal 28 Maret 2022.

Rekapitulasi Kehadiran Pada RUPS Tahunan 2022

No.	Nama	Jabatan	Kehadiran
1.	Chandra M. Hamzah	Komisaris Utama/Independen	Hadir
2.	Iqbal Latanro	Wakil Komisaris Utama/Independen	Hadir
3.	Ahdi Jumhari Luddin	Komisaris Independen	Hadir
4.	Armand B. Arief	Komisaris Independen	Hadir
5.	Eko Djoeli Heripoerwanto	Komisaris	Hadir
6.	Heru Budi Hartono	Komisaris	Hadir
7.	Andin Hadiyanto	Komisaris	Hadir
8.	Haru Koesmahargyo	Direktur Utama	Hadir
9.	Nixon L.P. Napitupulu	Wakil Direktur Utama	Hadir
10.	Nofry Rony Poetra	Direktur Finance, Planning, and Treasury	Hadir
11.	Elisabeth Novie Riswanti	Direktur Wholesale Risk and Asset Management	Hadir
12.	Eko Waluyo	Direktur Compliance and Legal	Hadir
13.	Setiyo Wibowo	Direktur Risk Management and Transformation	Hadir
14.	Jasmin	Direktur Distribution and Retail Funding	Hadir
15.	Andi Nirwoto	Direktur Operation, IT, and Digital Banking	Hadir
16.	Hirwandi Gafar	Direktur Consumer and Commercial Lending	Hadir
17.	Adi Prakoso	Anggota Komite Audit	Hadir
18.	Peter Eko Budi Darwito	Anggota Komite Audit	Hadir

Pihak Independen Penghitung Suara

Hasil pengambilan keputusan dihitung oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek ("BAE") yang ditunjuk oleh Perseroan dan selanjutnya divalidasi oleh Notaris Ashoya Ratam, SH, MKn.

Keputusan dan Realisasi RUPS Tahunan 2022

Agenda Pertama

Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan, Persetujuan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2021.

Tidak terdapat penanya dalam pembahasan mata acara pertama Rapat, namun terdapat tanggapan dari pemegang saham Seri A Dwiwarna.

Hasil Pemungutan suara

Setuju : 7.986.413.743 (99,8468633%)

Tidak Setuju : 200 (0,0000025%)

Abstain : 12.248.691 (0,1531342%)

Keputusan

- Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku 2021, dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan yang didalamnya mencakup Laporan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja sesuai Laporan Nomor 00054/2.1032/AU.1/07/0240-1/1/II/2022 tanggal 7 Februari 2022, dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material.
- Menerima Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja sesuai Laporan Nomor 00053/2.1032/AU.2/07/0240-1/1/II/2022 tanggal 7 Februari 2022 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material.
- Dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan disahkannya Laporan Keuangan yang mencakup pula Laporan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021, maka RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021, termasuk pengurusan dan pengawasan terhadap Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN yang berakhir pada 31 Desember 2021, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam Laporan tersebut di atas.

Status: Terealisasi/Terlaksana

Agenda Kedua

Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2021.

Tidak terdapat penanya dalam pembahasan mata acara kedua Rapat.

Hasil Pemungutan suara

Setuju : 7.988.462.434 (99,8724762%)

Tidak Setuju : 10.200.200 (0,1275238%)

Abstain : 0 (0%)

Keputusan

Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2021 sebesar Rp2.376.225.756.803,- (dua triliun tiga ratus tujuh puluh enam miliar dua ratus dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) sebagai berikut:

- Sebesar 10% (sepuluh persen) atau Rp237.622.575.680,- (dua ratus tiga puluh tujuh miliar enam ratus dua puluh dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus delapan puluh rupiah) ditetapkan sebagai Dividen Tunai kepada para pemegang saham yang akan dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Khusus dividen bagian Pemerintah atas kepemilikan 60% (enam puluh persen) saham sebesar Rp142.573.545.408,- (seratus empat puluh dua miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus empat puluh lima ribu empat ratus delapan puluh rupiah), akan disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara.
 - Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen Tahun Buku 2021 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Sebesar 90% (sembilan puluh persen) atau Rp2.138.603.181.123,- (dua triliun seratus tiga puluh delapan miliar enam ratus tiga juta seratus delapan puluh satu ribu seratus dua puluh tiga rupiah) ditetapkan sebagai saldo Laba Ditahan.

Status: Terealisasi/Terlaksana

Agenda Ketiga

Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Tahun Buku 2022.

Tidak terdapat penanya dalam pembahasan mata acara ketiga Rapat.

Hasil Pemungutan suara

Setuju : 7.660.751.562 (95,7754054%)

Tidak Setuju : 337.911.072 (4,2245946%)

Abstain : 0 (0%)

Keputusan

- Menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja, sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan serta Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) dan laporan lainnya untuk Tahun Buku 2022.
- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan periode lainnya pada Tahun Buku 2022 untuk tujuan dan kepentingan Perseroan.
- Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi KAP tersebut, serta menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal KAP Purwantono, Sungkoro & Surja, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan untuk Tahun Buku 2022, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut.

Status: Terealisasi/Terlaksana

Agenda Keempat

Penetapan remunerasi/penghasilan (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) Tahun 2022, serta tantiem Tahun Buku 2021 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Tidak terdapat penanya dalam pembahasan mata acara keempat Rapat.

Hasil Pemungutan suara

Setuju : 7.866.975.417 (98,3536421%)

Tidak Setuju : 131.686.617 (1,643579%)

Abstain : 600 (0,0000075%)

Keputusan

- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan bagi anggota Dewan Komisaris besarnya tantiem untuk kinerja Tahun Buku 2021 dan gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan untuk Tahun 2022.
- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan bagi anggota Direksi besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2021 dan gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan untuk Tahun 2022.

Status: Terealisasi/Terlaksana

Agenda Kelima

Persetujuan Pengkinian Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Perseroan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.03/2017 tentang Rencana Aksi (*Recovery Plan*) bagi Bank Sistemik.

Tidak terdapat penanya dalam pembahasan mata acara kelima Rapat.

Hasil Pemungutan suara

Setuju : 7.998.662.434 (99,9999975%)

Tidak Setuju : 200 (0,0000025%)

Abstain : 0 (0%)

Keputusan

Menyetujui Pengkinian Rencana Aksi Perseroan dalam rangka memenuhi regulasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.03/2017 tanggal 4 April 2017 tentang Rencana Aksi (*Recovery Plan*) bagi Bank Sistemik.

Status: Terealisasi/Terlaksana

Agenda Keenam

Penguatan Pemberlakuan atas:

- Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-05/MBU/04/2021 tanggal 8 April 2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;
- Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-11/MBU/07/2021 tanggal 30 Juli 2021 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara; dan
- Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-13/MBU/09/2021 tanggal 24 September 2021 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

Tidak terdapat penanya dalam pembahasan mata acara keenam Rapat.

Hasil Pemungutan suara

Setuju : 7.998.662.434 (99,9999975%)

Tidak Setuju : 200 (0,0000025%)

Abstain : 0 (0%)

Keputusan

Menguatkan pemberlakuan atas:

- Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-05/MBU/04/2021 tanggal 8 April 2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara dan perubahan-perubahannya;
- Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-11/MBU/07/2021 tanggal 30 Juli 2021 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara dan perubahan-perubahannya;
- Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-13/MBU/09/2021 tanggal 24 September 2021 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara dan perubahan-perubahannya.

Status: Terealisasi/Terlaksana

Agenda Ketujuh

Persetujuan atas Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Tidak terdapat penanya dalam pembahasan mata acara ketujuh Rapat.

Hasil Pemungutan suara

Setuju : 6.951.162.908 (86,9040642%)

Tidak Setuju : 982.921.026 (12,2885671%)

Abstain : 64.578.700 (0,8073687%)

Keputusan

- Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut:
 - Sdr. Eko D. Heripoerwanto sebagai Komisaris;
 - Sdr. Nixon L.P. Napitupulu sebagai Wakil Direktur Utama;

yang diangkat masing-masing berdasarkan keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2018 tanggal 17 Mei 2019 dan RUPS Tahunan Tahun Buku 2016 tanggal 17 Maret 2017 jo RUPS Tahunan Tahun Buku 2020 tanggal 10 Maret 2021, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikirannya selama memangku jabatan tersebut.

2. Mengubah nomenklatur jabatan anggota-anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:

No.	Semula	Menjadi
1.	Direktur Consumer & Commercial Lending	Direktur Consumer
2.	Direktur Finance, Planning & Treasury	Direktur Finance
3.	Direktur Compliance & Legal	Direktur Human Capital, Compliance, & Legal
4.	Direktur Wholesale Risk & Asset Management	Direktur Assets Management
5.	Direktur Operation, IT, & Digital Banking	Direktur IT & Digital
6.	Direktur Distribution & Retail Funding	Direktur Distribution & Funding
7.	Direktur Risk Management & Transformation	Direktur Risk Management

3. Mengalihkan penugasan nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:

No.	Nama	Semula	Menjadi
1.	Hirwandi Gafar	Direktur Consumer & Commercial Lending	Direktur Consumer
2.	Nofry Rony Poetra	Direktur Finance, Planning & Treasury	Direktur Finance
3.	Eko Waluyo	Direktur Compliance & Legal	Direktur Human Capital, Compliance, & Legal
4.	Elisabeth Novie Riswanti	Direktur Wholesale Risk & Asset Management	Direktur Assets Management
5.	Andi Nirwoto	Direktur Operation, IT, & Digital Banking	Direktur IT & Digital
6.	Jasmin	Direktur Distribution & Retail Funding	Direktur Distribution & Funding
7.	Setiyo Wibowo	Direktur Risk Management & Transformation	Direktur Risk Management

yang diangkat masing-masing berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2020 tanggal 10 Maret 2021, Keputusan RUPS Tahun 2019 tanggal 29 Agustus 2019, Keputusan RUPS Tahun 2019 tanggal 27 November 2019 dan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2017 tanggal 23 Maret 2018, dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan berdasarkan Keputusan RUPS tersebut.

4. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris sebagai berikut:

- Herry Trisaputra Zuna - sebagai Komisaris;
- Himawan Arief Sugoto - sebagai Komisaris;
- Sentot A Sentausa - sebagai Komisaris Independen;
- Nixon L.P. Napitupulu - sebagai Wakil Direktur Utama.

5. Masa jabatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 4, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

6. Dengan adanya pemberhentian, perubahan nomenklatur jabatan, pengalihan tugas, dan pengangkatan anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai 4, maka susunan keanggotaan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

- Dewan Komisaris
 - Komisaris Utama/Independen : Chandra Hamzah
 - Wakil Komisaris Utama/Independen : Iqbal Latanro
 - Komisaris : Heru Budi Hartono
 - Komisaris : Andin Hadyanto
 - Komisaris : Herry Trisaputra Zuna
 - Komisaris : Himawan Arief Sugoto
 - Komisaris Independen : Armand Bachtiar Arief
 - Komisaris Independen : Ahdi Jumhari Luddin
 - Komisaris Independen : Sentot A. Sentausa
- Direksi
 - Direktur Utama : Haru Koesmahargo
 - Wakil Direktur Utama : Nixon L.P. Napitupulu
 - Direktur Consumer : Hirwandi Gafar
 - Direktur Finance : Nofry Rony Poetra
 - Direktur Human Capital, Compliance, & Legal : Eko Waluyo
 - Direktur Assets Management : Elisabeth Novie Riswanti
 - Direktur IT & Digital : Andi Nirwoto
 - Direktur Distribution & Funding : Jasmin
 - Direktur Risk Management : Setiyo Wibowo

7. Anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 4 baru dapat melaksanakan tugasnya setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit & Proper Test*) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk, kemudian dinyatakan tidak disetujui sebagai anggota Direksi dan Dewan Komisaris dalam Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit & Proper Test*) oleh OJK, maka anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut diberhentikan dengan hormat sejak tanggal ditetapkannya keputusan hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit & Proper Test*) OJK dimaksud.

8. Anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 4 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.

9. Meminta kepada Direksi untuk mengajukan permohonan tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk pelaksanaan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit & Proper Test*) atas anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 4.

10. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan RUPS ini dalam bentuk Akta Notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan rapat.

Status: Terealisasi/Terlaksana

Pelaksanaan RUPS Luar Biasa Tahun 2022 dan Realisasinya

Tahapan	Uraian
Pemberitahuan	Surat Nomor 493/DIR/CSD/IX/2022 tanggal 2 September 2022 Perihal Penyampaian Tanggal Pelaksanaan dan Mata Acara RUPS Luar Biasa PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk disampaikan kepada OJK dengan tembusan PT Bursa Efek Indonesia
Pengumuman	Dipublikasikan melalui situs web penyedia e-RUPS, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan pada hari Jumat, tanggal 9 September 2022.
Pemanggilan	Dipublikasikan melalui situs web penyedia e-RUPS, situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan, dan surat kabar harian Investor Daily pada hari Senin, tanggal 26 September 2022.
Pelaksanaan	RUPS dilaksanakan pada hari Selasa, 18 Oktober 2022 pukul 14.27 WIB – 15.11 WIB bertempat di Gedung Menara BTN, lantai 6 Jl. Gajah Mada No. 1 Jakarta Pusat 10130.
Pengumuman Ringkasan Risalah RUPS	Dipublikasikan melalui situs web penyedia e-RUPS, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan pada tanggal 19 Oktober 2022.
Berita Acara RUPS	Surat Nomor 669/CSD/RCD/XII/2022 tanggal 31 Oktober 2022 Perihal Penyampaian Akta Risalah RUPS Luar Biasa Tahun 2022 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk disampaikan kepada OJK pada tanggal 31 Oktober 2022.

Rekapitulasi Kehadiran Pada RUPS Luar Biasa Tahun 2022

No.	Nama	Jabatan	Kehadiran
1.	Chandra M. Hamzah	Komisaris Utama/Independen	Hadir
2.	Iqbal Latanro	Wakil Komisaris Utama/Independen	Hadir
3.	Ahdi Jumhari Luddin	Komisaris Independen	Hadir
4.	Armand B. Arief	Komisaris Independen	Hadir
5.	Sentot A. Sentausa	Komisaris Independen	Hadir
6.	Andin Hadiyanto	Komisaris	Hadir
7.	Herry Trisaputra Zuna	Komisaris	Hadir
8.	Himawan Arief Sugoto*	Komisaris	Hadir
9.	Haru Koesmahargyo	Direktur Utama	Hadir
10.	Nixon L.P. Napitupulu	Wakil Direktur Utama	Hadir
11.	Nofry Rony Poetra	Direktur Finance	Hadir
12.	Eko Waluyo	Direktur Human Capital, Compliance and Legal	Hadir
13.	Setiyo Wibowo	Direktur Risk Management	Hadir
14.	Jasmin	Direktur Distribution and Funding	Hadir
15.	Andi Nirwoto	Direktur IT and Digital	Hadir
16.	Hirwandi Gafar	Direktur Consumer	Hadir
17.	Elisabeth Novie Riswanti	Direktur Assets Management	Hadir
18.	Adi Prakoso	Anggota Komite Audit	Hadir
19.	Peter Eko Budi Darwito	Anggota Komite Audit	Hadir

*) Hadir dalam Rapat melalui video telekonferensi

Pihak Independen Penghitung Suara

Hasil pengambilan keputusan dihitung oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek ("BAE") yang ditunjuk oleh Perseroan dan selanjutnya divalidasi oleh Notaris Ashoya Ratam, SH, MKn.

Keputusan dan Realisasi RUPS Luar Biasa Tahun 2022

Mata Acara Rapat

Persetujuan atas Penambahan Modal Perseroan dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada para Pemegang Saham yang akan dilakukan melalui mekanisme Penawaran Umum Terbatas II dan oleh karenanya sekaligus mengubah Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan.

Terdapat 2 (dua) orang penanya yang disampaikan melalui eASY.KSEI.

Hasil Pemungutan suara

Setuju : 8.602.800.944 (99,9899926%)

Tidak Setuju : 220.200 (0,0025594%)

Abstain : 640.800 (0,0074480%)

1. Menyetujui Perseroan melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan melalui mekanisme Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Penawaran Umum Terbatas II ("PMHMETD"), yaitu dengan cara penerbitan saham baru sebanyak-banyaknya 4.600.000.000 (empat miliar enam ratus juta) lembar saham seri B dengan nilai nominal sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah) per saham, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan yang merupakan hasil dari pelaksanaan PMHMETD.
3. Menyetujui pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan PMHMETD, untuk:
 - a. Menyetujui penetapan kepastian jumlah saham baru yang diterbitkan dalam PMHMETD dan harga pelaksanaan HMETD sebagaimana diusulkan oleh Direksi Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang pasar modal;
 - b. Menyatakan realisasi jumlah saham yang sesungguhnya telah dikeluarkan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor setelah pelaksanaan PMHMETD selesai dilaksanakan. Selanjutnya, menyampaikan pemberitahuan atas perubahan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) Anggaran Dasar

Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, serta membuat perubahan dan/atau tambahan yang diperlukan untuk maksud tersebut.

4. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan PMHMETD, untuk:
 - a. Menandatangani pernyataan pendaftaran untuk diajukan kepada OJK;
 - b. Menegosiasikan dan menandatangani perjanjian-perjanjian lainnya, termasuk terkait dengan perjanjian pembelian siaga (jika ada) dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik untuk Perseroan oleh Direksi Perseroan;
 - b. Menandatangani, mencetak dan/atau menerbitkan Prospektus Ringkas, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Prospektus Ringkas, Prospektus Awal, Prospektus, Info Memo dan/atau seluruh perjanjian-perjanjian dan/atau dokumen-dokumen yang diperlukan sehubungan dengan PMHMETD;
 - c. Menentukan harga pelaksanaan dalam rangka PMHMETD dengan persetujuan Dewan Komisaris;
 - d. Menetapkan kepastian jumlah saham yang diterbitkan dengan persetujuan Dewan Komisaris;
 - e. Menentukan tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas HMETD;
 - f. Menentukan rasio pemegang saham yang berhak atas HMETD;
 - g. Menentukan dan memastikan penggunaan dana yang diperoleh dari hasil PMHMETD;
 - h. Menentukan jadwal pelaksanaan PMHMETD;
 - i. Menentukan ada atau tidak adanya Pembeli Siaga, serta menetapkan dan menegosiasikan syarat dan ketentuan perjanjian antara Perseroan dengan Pembeli Siaga, jika ada;
 - j. Menitipkan saham Perseroan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sesuai dengan peraturan KSEI;
 - k. Mencatatkan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek Indonesia dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - l. Menegaskan satu atau lebih keputusan yang tercantum di dalam keputusan Rapat dalam satu atau lebih akta Notaris;
 - m. Melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan sehubungan dengan PMHMETD Perseroan termasuk yang disyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEPUTUSAN RUPS PADA TAHUN BUKU DAN 1 (SATU) TAHUN SEBELUM TAHUN BUKU YANG DIREALISASIKAN PADA TAHUN BUKU

Seluruh keputusan RUPS Tahun Buku 2023 telah terealisasi/terlaksana pada tahun 2023 dan RUPS Tahun Buku 2022 telah terealisasi/terlaksana pada tahun 2022. Sehingga tidak terdapat keputusan RUPS Tahun 2022 dan Keputusan RUPS yang belum direalisasikan pada tahun 2023.

Direksi

Direksi merupakan organ dalam pelaksanaan Tata Kelola yang bertanggungjawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar Perseroan dan/atau Keputusan RUPS. Direksi bertanggung jawab mengelola dan menetapkan arah strategis Perseroan, memanfaatkan dan menjaga aset Perseroan untuk tujuan dan kepentingan Perseroan. Untuk selanjutnya, Direksi melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Dewan Komisaris.

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala keladuan dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.

Direktur Utama merupakan Koordinator Direksi, dengan tugas sebagai berikut:

1. Memimpin rapat Direksi.
2. Menciptakan budaya keterbukaan dan memfasilitasi diskusi yang konstruktif.
3. Memberikan saran kepada anggota Direksi terkait efektivitas pelaksanaan tugas pengurusan.
4. Memelihara hubungan dan soliditas antar Sesama anggota Direksi terkait pelaksanaan tugas pengurusan.
5. Memelihara hubungan yang efektif dan sehat dengan Dewan Komisaris.

Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud di atas, apabila dapat membuktikan:

1. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.
2. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan

sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

3. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian.
4. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan, paling kurang mencakup:

1. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank.
2. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi.
3. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank.
4. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
5. Meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank.
6. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank tidak menyimpang dari ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.
8. Melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris paling sedikit secara triwulanan.

Tugas dan Tanggung Jawab Masing-Masing Direksi

Periode 1 Januari 2023 – 09 April 2023

Nama	Jabatan	Bidang Tugas
Haru Koesmahargyo	Direktur Utama	Direktur Utama mensupervisi: a. Direktur Assets Management b. Direktur IT and Digital c. Direktur Finance d. Direktur Risk Management e. Direktur Human Capital, Compliance and Legal f. SEVP Operations g. Internal Audit Division h. Corporate Secretary Division
Nixon L.P. Napitupulu	Wakil Direktur Utama	Wakil Direktur Utama mensupervisi: a. Direktur Consumer b. Direktur Distribution and Funding c. SEVP Wholesale Banking d. Marketing Communication Division
Andi Nirwoto	Direktur IT and Digital	Direktur IT and Digital mensupervisi: a. Digital Channel Division b. IT Strategic Planning & Development Division c. IT Operation Division d. Data Management & Analytics Division e. IT Security Division

Nama	Jabatan	Bidang Tugas
Elisabeth Novie Riswanti	Direktur Assets Management	Direktur Assets Management mensupervisi: a. Commercial Asset Management 1 Division b. Commercial Asset Management 2 Division c. Consumer Collection, Recovery & Asset Sales Division d. Procurement & Fixed Asset Management Division
Jasmin	Direktur Distribution and Funding	Direktur Distribution and Funding mensupervisi: a. Wealth Management Division b. Retail Funding & Services Division c. Institutional Funding Division d. Service Quality & Distribution Division e. Regional Offices
Setiyo Wibowo	Direktur Risk Management	Direktur Risk Management mensupervisi: a. Retail Credit Risk Division b. Commercial Credit Risk Division c. Enterprise Risk Management Division d. Transformation & Partnership Management Division
Hirwandi Gafar	Direktur Consumer	Direktur Consumer mensupervisi: a. Commercial Banking Division b. SME Banking Division c. Non Subsidized Mortgage & Personal Lending Division d. Subsidized Mortgage Lending Division e. Sharia Business Division
Nofry Rony Poetra	Direktur Finance	Direktur Finance mensupervisi: a. Treasury Division b. Corporate Strategy & Planning Division c. Finance & Accounting Division d. Investor Relations & Research Division
Eko Waluyo	Direktur Human Capital, Compliance and Legal	Direktur Human Capital, Compliance and Legal mensupervisi: a. SEVP Compliance and Legal b. Human Capital Strategy Division c. Human Capital Management Division d. Learning Management Division

Periode 16 Maret 2023 – 9 April 2023

Nama	Jabatan	Bidang Tugas
Nixon L.P. Napitupulu	Direktur Utama*	Direktur Utama mensupervisi: a. Direktur Assets Management b. Direktur IT and Digital c. Direktur Finance d. Direktur Risk Management e. Direktur Human Capital, Compliance and Legal f. SEVP Operations g. Internal Audit Division h. Corporate Secretary Division
Oni Febriarto Rahardjo	Wakil Direktur Utama*	Wakil Direktur Utama mensupervisi: a. Direktur Consumer b. Direktur Distribution and Funding c. SEVP Wholesale Banking d. Marketing Communication Division
Nofry Rony Poetra	Direktur Finance	Direktur Finance mensupervisi: a. Treasury Division b. Corporate Strategy & Planning Division c. Finance & Accounting Division d. Investor Relations & Research Division
Elisabeth Novie Riswanti	Direktur Assets Management	Direktur Assets Management mensupervisi: a. Commercial Asset Management 1 Division b. Commercial Asset Management 2 Division c. Consumer Collection, Recovery & Asset Sales Division d. Procurement & Fixed Asset Management Division
Eko Waluyo	Direktur Human Capital, Compliance and Legal	Direktur Human Capital, Compliance and Legal mensupervisi: a. SEVP Compliance and Legal b. Human Capital Strategy Division c. Human Capital Management Division d. Learning Management Division

Nama	Jabatan	Bidang Tugas
Setiyo Wibowo	Direktur Risk Management	Direktur Risk Management mensupervisi: a. Retail Credit Risk Division b. Commercial Credit Risk Division c. Enterprise Risk Management Division d. Transformation & Partnership Management Division
Jasmin	Direktur Distribution and Funding	Direktur Distribution and Funding mensupervisi: a. Wealth Management Division b. Retail Funding & Services Division c. Institutional Funding Division d. Service Quality & Distribution Division e. Regional Offices
Andi Nirwoto	Direktur IT and Digital	Direktur IT and Digital mensupervisi: a. Digital Channel Division b. IT Strategic Planning & Development Division c. IT Operation Division d. Data Management & Analytics Division e. IT Security Division
Hirwandi Gafar	Direktur Consumer	Direktur Consumer mensupervisi: a. Commercial Banking Division b. SME Banking Division c. Non Subsidized Mortgage & Personal Lending Division d. Subsidized Mortgage Lending Division e. Sharia Business Division
Hakim Putratama	Direktur Institutional Banking*	-

*) Efektif setelah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*)

Periode 10 April 2023 – 31 Desember 2023

Nama	Jabatan	Bidang Tugas
Nixon L.P. Napitupulu	Direktur Utama*	Direktur Utama mensupervisi area: a. Retail Banking (termasuk consumer funding dan distribution) b. Finance c. Operation d. Teknologi & Digital e. Risk Management f. Internal Audit (IAD) g. Corporate Secretary (CSD)
Oni Febriarto Rahardjo	Wakil Direktur Utama**	Wakil Direktur Utama mensupervisi area: a. Wholesale & Institutional Banking b. Human Capital, Compliance and Legal c. Asset Quality & IAR d. Sharia e. Marketing Communication (MCD)
Nofry Rony Poetra	Direktur Finance	Direktur Finance mensupervisi: a. Treasury (TRSD) b. Corporate Strategy & Planning (CSPD) c. Finance & Accounting (FAD) d. Investor Relations & Research (IRRD)
Elisabeth Novie Riswanti	Direktur Assets Management	Direktur Assets Management mensupervisi: a. Commercial Asset Management 1 (CAMD 1)*** b. Commercial Asset Management 2 (CAMD 2)*** c. Consumer Collection, Recovery & Asset Sales (CRSD)*** d. Procurement & Fixed Asset Management (PFAD)
Eko Waluyo	Direktur Human Capital, Compliance and Legal	Direktur Human Capital, Compliance and Legal mensupervisi: a. SEVP Compliance and Legal b. Human Capital Strategy (HCSD) c. Human Capital Management (HCMD) d. Human Capital Business Partner Division (HCBP)**** e. Learning Management (LMD)
Setiyo Wibowo	Direktur Risk Management	Direktur Risk Management mensupervisi: a. Retail Credit Risk (RCRD) b. Wholesale Credit Risk (WCRD) c. Enterprise Risk Management (ERMD) d. Transformation & Partnership Management (TPMD)

Nama	Jabatan	Bidang Tugas
Jasmin	Direktur Distribution and Funding	Direktur Distribution and Funding mensupervisi: a. Wealth Management (WMD) b. Retail Funding (RFD) c. Service Quality & Distribution (SQDD) d. Regional Offices (RO)
Andi Nirwoto	Direktur IT and Digital	Direktur IT and Digital mensupervisi: a. Digital Banking (DBD) b. IT Strategic Planning & Development (ITPD) c. IT Operation (ITOD) d. Data Management & Analytics (DMD) e. IT Security (ITSD)
Hirwandi Gafar	Direktur Consumer	Direktur Consumer mensupervisi: a. SME Banking (SMBD) b. Non Subsidized Mortgage (NSMD)***** c. Subsidized Mortgage (SMD) d. Sharia Banking (SHAD) e. Personal Banking (PBD)*****
Hakim Putratama	Direktur Institutional Banking*****	Direktur Institutional Banking mensupervisi: a. Institutional Funding b. Financial Institution & Capital Market (FICD) c. Wholesale Transaction (WTD)

*)Efektif menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tanggal 7 Juni 2023
 **) Efektif menjabat sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan sejak tanggal 7 Juni 2023
 ***) *Redeployment* divisi berlaku sejak tanggal 5 Juni 2023
 *****) *Redeployment* divisi berlaku sejak tanggal 1 November 2023
 *****) *Redeployment* divisi berlaku sejak tanggal 25 Agustus 2023
 *****) Efektif menjabat sebagai Direktur Institutional Banking Perseroan sejak tanggal 26 Juli 2023

Hak dan Wewenang Direksi

Direksi memiliki hak dan wewenang yang telah diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi. Adapun hak dan wewenang Direksi adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan kebijakan yang dipandang tepat dalam kepengurusan Perseroan.
2. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang atau beberapa orang pegawai Perseroan baik secara sendiri-sendiri maupun Bersama-sama atau kepada orang atau badan lain.
3. Mengatur ketentuan tentang pekerja Perseroan termasuk penetapan upah, pensiun atau jaminan hari tua, dan penghasilan lain bagi pekerja Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Mengangkat dan memberhentikan pekerja Perseroan berdasarkan peraturan ketenagakerjaan Perseroan dan peraturan perundang-undangan.
5. Membentuk fungsi Sekretaris Perseroan (*Corporate Secretary*).
6. Memberikan Keputusan hapus buku piutang macet yang selanjutnya dilaporkan dan dipertanggungjawabkan dalam Laporan Tahunan.
7. Tidak menagih lagi sebagian atau seluruh piutang di luar pokok dalam rangka restrukturisasi dan/atau penyelesaian kredit namun dengan kewajiban melaporkan kepada Dewan Komisaris.

8. Menghapus tagih piutang bunga, denda, ongkos-ongkos dan piutang lainnya di luar pokok yang dilakukan dalam rangka restrukturisasi dan/atau penyelesaian piutang serta perbuatan-perbuatan lain dalam rangka penyelesaian piutang Perseroan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian.
9. Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilihan kekayaan Perseroan, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perseroan, termasuk tidak terbatas pada optimalisasi pemanfaatan asset Perseroan, dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau keputusan RUPS.

Masa Jabatan Direksi

Masa jabatan anggota Direksi ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal ditutupnya atau tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya, dengan syarat tidak boleh melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir.

Jabatan Direksi berakhir apabila meninggal dunia, masa jabatannya berakhir termasuk mengundurkan diri dari jabatannya, diberhentikan berdasarkan Keputusan RUPS, atau tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Direksi berdasarkan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan termasuk rangkap jabatan yang dilarang.

Persyaratan Direksi

Persyaratan Direksi yang telah diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja adalah sebagai berikut:

1. Subjek hukum yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan, yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:
 - a. Memenuhi persyaratan materiil, yaitu:
 - Keahlian;
 - Integritas;
 - Kepemimpinan;
 - Pengalaman;
 - Jujur;
 - Perilaku yang baik; dan
 - Dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perusahaan.
 - b. Selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada butir 1 di atas, untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi Perseroan, seseorang harus memenuhi syarat formal sebagai berikut:
 - Orang perseorangan;
 - Mampu melaksanakan perbuatan hukum;
 - Tidak pernah dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan;
 - Tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu BUMN, Anak Perusahaan dan/atau badan usaha lainnya dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan;
 - Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara, BUMN, Anak Perusahaan, badan usaha lainnya dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan;
 - Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - 1) Pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan;
 - 2) Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - 3) Pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - 4) Pernah tidak menyebabkan Perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
 - c. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
 - d. Cakap melakukan perbuatan hukum;
2. Setiap anggota Direksi harus memenuhi persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan dan telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
3. Seluruh anggota Direksi wajib berdomisili di Indonesia. Direktur Utama wajib berasal dari pihak yang independent terhadap pemegang saham pengendali.
4. Mayoritas anggota Direksi wajib memiliki pengalaman paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang operasional dan paling rendah sebagai Pejabat Eksekutif Bank.
5. Setiap anggota Direksi harus memenuhi persyaratan lain, yaitu:
 - a. Bukan pengurus partai politik, calon anggota legislatif, dan/atau anggota legislatif pada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. Bukan calon kepala/wakil kepala daerah dan/atau kepala/wakil kepala daerah, termasuk penjabat kepala/wakil kepala daerah;
 - c. Tidak menjabat sebagai anggota Direksi pada BUMN atau Anak Perusahaan yang bersangkutan selama 2 (dua) periode;
 - d. Tidak sedang menjabat sebagai pejabat pada Kementerian/Lembaga, anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN lain, anggota Direksi pada BUMN lain, anggota Direksi pada Anak Perusahaan dan/atau badan usaha lainnya;
 - e. Tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota Direksi;
 - f. Memiliki dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk melakukan tugasnya yang dinyatakan dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan;
 - g. Sehat jasmani dan Rohani (tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai anggota Direksi), yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari rumah sakit; dan
 - h. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak salaam dua tahun terakhir.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Direksi mengacu pada Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi yang telah disahkan melalui Kebijakan Khusus Nomor KK.6-G tanggal 12 September 2023 Tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi merupakan satu infrastruktur tata kelola yang menjadi pedoman bagi Direksi dalam melaksanakan tugas, wewenang, tanggung jawab, hak dan kewajiban selaku pengurus Perseroan. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi disusun berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, mengacu pada peraturan tentang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikat Perseroan. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi ditinjau secara periodik.

Adapun isi Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi adalah sebagai berikut:

Bab I	Pendahuluan
Bab II	Organisasi dan Kewenangan A. Organisasi Dalam Ruang Lingkup Tata Tertib Kerja Direksi B. Kewenangan Organisasi Ruang Lingkup Tata Tertib Kerja Direksi
Bab III	Nilai-nilai
Bab IV	Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi A. Struktur dan Komposisi Direksi B. Persyaratan Anggota Direksi C. Kriteria Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan D. Rangkap Jabatan Direksi E. Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi F. Masa Jabatan Direksi G. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi H. Kewajiban Direksi I. Hak dan Wewenang Direksi J. Perbuatan-perbuatan Direksi yang Memerlukan Persetujuan Dewan Komisaris K. Pembagian Tugas dan Wewenang Direksi L. Larangan M. Transparansi N. Etika Kerja O. Waktu Kerja P. Pengaturan Rapat Q. Kepemimpinan R. Evaluasi Kinerja Direksi S. Pelaporan dan Pertanggungjawaban T. Komite U. Lain-Lain
Bab V	Risiko dan Mitigasi
Bab VI	Dokumentasi, Administrasi, dan Pelaporan
Bab VII	Monitoring
Bab VIII	Penutup

Kebijakan Rangkap Jabatan Direksi

Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai:

1. Anggota Direksi pada BUMN dan badan usaha lainnya;
2. Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN lainnya;
3. Jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/ lembaga pemerintah pusat dan/atau daerah;
4. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan;
5. Pengurus partai politik, anggota legislatif dan/atau kepala daerah/wakil kepala daerah;
6. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan; dan/atau
7. Menjadi calon legislatif atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah.

Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif pada Perseroan, perusahaan dan/atau lembaga lain. Tidak termasuk rangkap jabatan dalam hal Direksi yang bertanggung jawab

terhadap pengawasan atas penyertaan Perseroan pada perusahaan anak, menjalankan tugas fungsional menjadi anggota Dewan Komisaris pada perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Perseroan, sepanjang tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Direksi Perseroan.

Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada perusahaan lain, kecuali:

1. Dewan Komisaris pada Perusahaan Anak/Perusahaan terafiliasi Perseroan bukan bank, selain sebagai Komisaris Utama;
2. Dewan Komisaris pada badan usaha lain untuk mewakili/ memperjuangkan kepentingan Bank sepanjang memperoleh izin dari Menteri, dan;
3. Dewan Pengawas Dana Pensiun, yang dimiliki oleh Bank.

Anggota Direksi yang mempunyai rangkap jabatan di luar Perseroan, harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris.

Tabel Rangkap Jabatan Direksi

Nama	Jabatan	Jabatan pada Perusahaan/ Instansi Lain	Nama Perusahaan/ Instansi Lain
Haru Koesmahargyo*	Direktur Utama	-	-
Nixon L.P. Napitupulu**	Direktur Utama	-	-
Oni Febriarto Rahardjo***	Wakil Direktur Utama	-	-
Andi Nirwoto	Direktur IT and Digital	-	-
Elisabeth Novie Riswanti	Direktur Assets Management	-	-
Jasmin	Direktur Distribution and Funding	-	-
Setiyo Wibowo	Direktur Risk Management	-	-
Hirwandi Gafar	Direktur Consumer	-	-
Nofry Rony Poetra	Direktur Finance	-	-
Eko Waluyo	Direktur Human Capital, Compliance, and Legal	-	-
Hakim Putratama***	Direktur Institutional Banking	-	-

*Berhenti menjabat sejak 16 Maret 2023 berdasarkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun 2023.

**Pengalihan penugasan semula sebagai Wakil Direktur Utama menjadi Direktur Utama sejak 16 Maret 2023.

***Mulai menjabat sejak 16 Maret 2023 dan mendapat pernyataan efektif dari OJK terhitung mulai tanggal 07 Juni 2023.

Pengelolaan Benturan Kepentingan Direksi

Setiap anggota Direksi dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan, selain remunerasi dan fasilitas lain yang sah, yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. Anggota Direksi dilarang memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perseroan.

Anggota Direksi dilarang memberikan atau menawarkan atau menerima, baik langsung maupun tidak langsung, sesuatu yang berharga kepada atau dari pelanggan atau seorang pejabat Pemerintah untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, atau kontrak yang diusulkan dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus dinyatakan sifat kepentingannya dalam suatu Rapat Direksi dan karenanya tidak berhak untuk ikut dalam mengambil suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut.

Dalam hal terjadi Benturan Kepentingan (*conflict of interest*) yaitu suatu kondisi dimana kepentingan ekonomis Perseroan berbenturan dengan kepentingan ekonomis pribadi, maka Anggota Direksi hendaknya senantiasa harus:

1. Mengutamakan kepentingan Perseroan dan tidak mengurangi keuntungan Bank dalam hal terjadi benturan kepentingan.
2. Menghindarkan diri dari pengambilan keputusan dalam situasi dan kondisi adanya benturan kepentingan.

3. Melakukan pengungkapan dalam hal pengambilan keputusan tetap harus diambil pada kondisi adanya benturan kepentingan.
4. Dalam hal pemberian kredit kepada anggota Direksi, harus berdasarkan batas kewajaran sesuai dengan peraturan Bank yang berlaku tanpa membedakan dengan nasabah lainnya (*arm's length basis*).
5. Melaporkan transaksi saham Perseroan dalam waktu 3 (tiga) hari kerja.

Rapat Direksi

1. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap bulan atau yang disebut Rapat Terjadwal Direksi (*Performance Review*).
2. Direksi harus menjadwalkan Rapat Terjadwal Direksi untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
3. Rapat Terjadwal Direksi wajib dihadiri oleh minimal 2/3 dari jumlah anggota Direksi.
4. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi.
5. Pemanggilan Rapat Direksi harus mencantumkan acara, tanggal, waktu, tempat rapat, dan menyertakan bahan rapat.
6. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung kepada setiap anggota Direksi dengan tanda terima yang memadai atau dengan pos paling lambat 5 (lima) hari sebelum Rapat diadakan.
7. Bahan rapat untuk Rapat Terjadwal sebagaimana dimaksud disampaikan kepada peserta rapat paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum rapat diselenggarakan melalui sarana email atau sarana tercepat lainnya.

8. Bahan rapat untuk rapat yang diselenggarakan di luar jadwal, penyampaian bahan rapatnya paling lambat pada saat rapat diselenggarakan.
9. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi; atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris.
10. Dalam hal anggota Direksi tidak dapat menghadiri Rapat Direksi secara fisik, maka anggota Direksi dapat menghadiri rapat dengan sarana telekonferensi, video konferensi, atau sarana elektronik lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal Rapat Direksi dilaksanakan dengan sarana teknologi telekonferensi, harus dilengkapi:
 - a. Dasar keputusan penyelenggaraan rapat dengan menggunakan sarana teknologi telekonferensi, antara lain seperti ketentuan intern Bank dan/atau risalah Rapat Direksi.
 - b. Bukti rekaman penyelenggaraan rapat.
 - c. Risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat yang hadir secara fisik maupun melalui sarana teknologi telekonferensi.
11. Dalam Rapat Direksi, seorang anggota Direksi dapat diwakili hanya oleh anggota Direksi lain berdasarkan surat kuasa. Seorang anggota Direksi hanya dapat mewakili seorang anggota Direksi lainnya.
12. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan usaha Perseroan atau di tempat lain di wilayah Republik Indonesia.
13. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama. Apabila Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, maka:
 - a. Wakil Direktur Utama yang memimpin; atau
 - b. Direktur yang ditunjuk secara tertulis oleh Direktur Utama yang memimpin rapat apabila pada saat yang bersamaan Wakil Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan; atau
 - c. Direktur yang ditunjuk oleh Wakil Direktur Utama, apabila pada saat yang bersamaan Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan dan Direktur Utama tidak melakukan penunjukan; atau
 - d. Apabila RUPS tidak mengangkat Wakil Direktur Utama, maka dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, maka salah seorang Direktur yang ditunjuk

secara tertulis oleh Direktur Utama yang memimpin rapat; atau

- e. Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukan, maka Direktur yang terlama dalam jabatan sebagai anggota Direksi yang memimpin Rapat Direksi; atau
- f. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang Direktur dengan masa jabatan paling lama sebagai anggota Direksi, maka Direktur yang tertua dalam usia yang bertindak sebagai pimpinan Rapat Direksi.

Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris

Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

Rapat Komite Direksi

Rapat Komite dapat dilakukan setiap waktu berdasarkan kebutuhan Komite dan atas permintaan tertulis dari sekretaris dan/atau anggota Komite.

Pengambilan Keputusan

1. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri dan atau diwakili oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.
2. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) usulan, maka dilakukan pemilihan ulang sehingga salah 1 (satu) usulan memperoleh suara lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.
3. Pengambilan keputusan Rapat Direksi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
4. Dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan pemungutan suara. Keputusan pada pemungutan suara harus memperoleh suara lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.
5. Dalam Rapat Direksi, setiap anggota Direksi berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk anggota Direksi lain yang diwakilinya dengan sah.
6. Suara blanko (abstain) dianggap menyetujui usul yang diajukan dalam rapat. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.

7. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.
8. Direksi dapat juga mengambil Keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut secara sirkuler. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan Keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.
9. Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara apapun, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus dinyatakan sifat kepentingannya dalam suatu Rapat Direksi dan karenanya tidak berhak untuk ikut dalam mengambil suara mengenai hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut.
10. Keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.
3. Risalah Rapat Direksi merupakan bukti yang sah untuk para anggota Direksi dan untuk pihak ketiga mengenai Keputusan yang diambil dalam rapat yang bersangkutan.
4. Salinan risalah rapat wajib diberikan kepada setiap anggota Direksi, baik yang bersangkutan hadir maupun tidak hadir dalam rapat Direksi tersebut.
5. Risalah asli dari rapat Direksi wajib didokumentasikan dan disimpan oleh Perseroan.
6. Jumlah rapat direksi dan jumlah kehadiran masing-masing anggota Direksi wajib disampaikan pada Laporan Tahunan.

Rencana Rapat Direksi

Rencana Rapat Direksi berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, telah disepakati bahwa Rapat Direksi tahun 2024 akan dilaksanakan minimal 1 (satu) kali tiap bulan dan/atau sesuai kebutuhan. Direksi juga melakukan Rapat bersama Komite di bawah Direksi yang dijadwalkan waktunya sesuai dengan kebutuhan.

Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap bulan atau yang disebut Rapat Terjadwal Direksi (*Performance Review*). Adapun agenda yang dibahas sekurang-kurangnya meliputi:

1. Penyusunan Rencana Bisnis Bank (RBB) dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP).
2. Reviu Kinerja Perseroan secara berkala.
3. Penerapan Program APU, PPT, dan PPPSPM.
4. Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan dan Tindak Lanjut temuan Audit Internal maupun Eksternal.

Direksi harus menjadwalkan Rapat Terjadwal Direksi untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku. Dalam pengambilan Keputusan, Rapat Terjadwal Direksi wajib dihadiri oleh minimal 2/3 dari jumlah anggota Direksi.

Pemanggilan rapat Direksi dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung kepada setiap anggota Direksi paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan. Bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum rapat diselenggarakan melalui sarana email atau sarana elektronik lainnya.

Hasil Rapat

1. Hasil rapat wajib dituangkan dalam Risalah Rapat yang memuat segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat, termasuk tetapi tidak terbatas pada pendapat yang berkembang dalam rapat, baik pendapat yang mendukung maupun yang tidak mendukung atau pendapat berbeda (*dissenting opinion*), serta alasan ketidakhadiran anggota Direksi, apabila ada. Risalah Rapat harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat serta kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.
2. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang tidak menandatangani Risalah Rapat, yang bersangkutan wajib menuliskan alasannya dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada Risalah Rapat.

Rapat Internal Direksi

Sepanjang tahun 2023, agenda, tanggal dan peserta rapat internal Direksi adalah sebagai berikut:

Tabel Rapat Internal Direksi

Nomor	Tanggal	Topik					
			HK	NPN	OFR	SWB	
1	3 Januari 2023	Agenda Umum	Cuti	√		√	
2		Usulan KPI Kolegial Tahun 2023	Cuti	√		√	
3		ALCO	Cuti	√		√	
4	9 Januari 2023	Agenda Umum	√	√		√	
5	16 Januari 2023	Performance Review Desember 2022	√	√		√	
6		Agenda Umum	√	√		√	
7	17 Januari 2023	Komite Manajemen Risiko	√	√		√	
8		Audit Laporan Keuangan Posisi Desember 2022	√	√		√	
9	24 Januari 2023	Update Audit Laporan Tahun Buku 2022 dan Update Audit Temuan BPK	√	√		√	
10		Usulan Update Agenda RUPS Tahun 2023	√	√		√	
11		Usulan Perubahan/Penambahan Nomor Akses Contact Center Bank BTN	√	√		√	
12		Materi HCMD : Talent Mobility	√	√		√	
13		Penyusunan Strategi, Prioritas, dan Roadmap Implementasi HCBP	√	√		√	
14	25 Januari 2023	ALCO	√	√		√	
15	30 Januari 2023	Agenda Umum	√	Cuti		√	
16	31 Januari 2023	Komite Manajemen Risiko	√	Cuti		√	
17	6 Februari 2023	Agenda Umum	√	Cuti		√	
18	10 Februari 2023	Perkembangan Audit Atas Laporan Keuangan Tahun 2022	√	√		√	
19	13 Februari 2023	Proyeksi Loan At Risk (LAR) Tahun 2023 Kredit dan Pembiayaan	√	√		√	
20	20 Februari 2023	Agenda Umum	√	√		√	
21		Materi HCMD : Perpanjangan SEVP Wholesale Banking	√	√		√	
22		Materi HCMD : Nominated Talent Bank BTN tahun 2023	√	√		√	
24	28 Februari 2023	ALCO	√	√		√	
25		Update Progress Project Al Fatih	√	√		Izin	
26		Project Roadmap & Strategi HC 2023 - 2025	√	√		√	
27		Penilaian KPI Unit Kerja Tahun 2022	√	Izin		√	
28	6 Maret 2023	Update Progress Project SBU BTN	√	√		√	
29		Rapat Pendiri, Dewan Pengawas dan Pengurus Dapen	√	√		√	
30	8 Maret 2023	Materi HCMD : Komite Sanksi dan Disiplin	√	√		√	
31		Komite Pengarah TI (KPTI)					
32	13 Maret 2023	Agenda Umum	√	Sakit		√	
33		ALCO	√	Sakit		√	
34	16 Maret 2023	Internal Direksi		√		√	

Kehadiran										Kuorum
	HRG	JSM	ENR	AND	EW	NRP	HP	BY	ASN	
	√	√	Cuti	Cuti	√	√		√	√	8
	√	√	Cuti	Cuti	√	√		√	√	8
	√	√	Cuti	Cuti	√	√		√	√	8
	√	√	√	√	√	√		√	√	11
	√	√	√	√	√	√		√	√	11
	√	√	√	√	√	√		√	√	11
	√	√	√	Dinas	√	√		√	√	10
	√	√	√	√	√	√		√	√	11
	√	√	√	√	√	√		√	√	11
	√	√	√	√	√	√		√	√	11
	√	√	√	√	√	√		√	√	11
	√	√	√	√	√	√		√	√	11
	√	√	√	√	√	√		√	√	11
	√	√	√	√	√	√		√	√	11
	√	√	√	√	√	√		√	√	11
	√	√	√	√	√	√		√	√	10
	Dinas	Dinas	√	√	√	Dinas		√	√	7
	√	√	√	√	√	√		√	√	10
	Dinas	√	Dinas	√	√	√		√	√	9
	√	√	√	√	√	Sakit		Dinas	√	9
	√	√	√	√	√	√		√	√	11
	√	√	√	√	√	√		√	√	11
	√	√	√	√	√	√		√	√	11
	√	√	Izin	√	√	√		√	√	10
	√	√	√	√	√	√		√	√	10
	√	√	Izin	√	√	√		√	√	10
	√	√	√	√	√	√		√	√	10
	√	Cuti	√	√	√	√		√	√	10
	√	Cuti	√	√	√	√		√	√	10
	√	Cuti	Izin	√	√	√		√	√	9
	√	√	√	√	√	√		√	√	10
	√	√	√	√	√	√		√	√	10
	√	√	√	√	√	√		√	√	10

Nomor	Tanggal	Topik					
			HK	NPN	OFR	SWB	
35	17 Maret 2023	Materi HCMD : Penilaian Kinerja L1, Kadiv, Kanwil dan Kacab dan Penetapan Jasa Produksi Tahun Buku 2022		√	√	√	
36	20 Maret 2023	Agenda Umum		√	√	√	
37		Permohonan Persetujuan Prinsip Pemenang <i>Beauty Contest</i> Pengadaan Konsultan Perencana Pembangunan Gedung Kantor BTN Jl. Pringgokusuman Yogyakarta dan Pembelian Lahan Operasional BTN		√	√	√	
38		Update Video Nasabah Viral an LPS		√	√	√	
39		Penetapan <i>Cost of Credit</i> Tahun 2023		√	√	√	
40		Audit <i>Progress</i> Audit BPK		√	Izin	√	
41	27 Maret 2023	Agenda Umum		√	Izin	√	
42		Update <i>Progress</i> Implementasi RBC		√	Izin	√	
43		Pengelolaan Produktivitas KCP		√	Izin	√	
44		Update Status <i>Mobile Banking</i> dan EDC		√	Izin	√	
45		Update Denda BI		√	√	√	
46	28 Maret 2023	Usulan Komite di Bawah Direksi		√	√	√	
47		Usulan Perubahan Struktur Organisasi dan Pembidangan Divisi		√	√	√	
48		Materi HCMD		√	√	√	
49		Materi HCMD		√	√	√	
50		<i>Performance Review</i> Februari 2023 dan Prognosa Maret 2023		√	√	√	
51	29 Maret 2023	Materi HCMD : <i>Talent Mobility</i>		√	√	√	
52		Materi HCMD : Komite Sanksi dan Disiplin		√	√	√	
53	3 April 2023	Agenda Umum		√	√	√	
54		Debitur <i>Watchlist</i> Kelolaan CAMD2, CMBD, CSTD		√	√	√	
55		Update Keputusan Steerco Untuk <i>Single Relationship Model</i> Segmen Korporasi		√	√	√	
56		<i>Project Job Evaluation & Grading Structure</i>		√	√	√	
57		Usulan Proyeksi Target 2023 terkait <i>Cost of Credit</i>		√	√	√	
58	4 April 2023	Update Pengelolaan <i>Wealth Management</i> dan Program Bundling dan Update Strategi Pengembangan KPR Segmen di atas Rp 1 M		√	√	√	
59		Rapat Komite Manajemen Risiko		√	√	√	
60		Laporan Keuangan Posisi 31 Maret 2023		√	√	√	
61		ALCO Khusus		√	√	√	
62		Komite HC : <i>Talent Mobility</i>		√	√	√	
63	10 April 2023	Agenda Umum		√	√	√	
64		Strategi KPR Subsidi Tahun 2023		√	√	√	
65		Update Penanganan Pengaduan Nasabah KC Cawang		√	√	√	
66		Kinerja Penyelesaian Sertifikat LAT		√	√	√	
67		Pembahasan Strategi Penjualan <i>Forex Retail</i>		√	√	√	
68		Penjualan <i>Consumer Loan</i> Bersama <i>Institutional</i> dan <i>Corporate Banking</i>		√	√	√	

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk 447

Nomor	Tanggal	Topik					
			HK	NPN	OFR	SWB	
69		Update Project Transaction Banking & High Yield Loan		√	√	√	
70	11 April 2023	ALCO		√	√	√	
72	17 April 2023	ALCO Khusus		√	√	√	
73		Pilot Project Business Ecosystem		√	√	√	
74		Strategi Penjualan Trade Services		√	√	√	
75		Tindak Lanjut Permen KBUMN		√	√	√	
76	18 April 2023	Komite Manajemen Risiko		√	√	√	
77	26 April 2023	Update Penanganan Pengaduan Nasabah KC Cawang		√	√	√	
78		Pengamanan Transaksi Prioritas dan Institusi Besar		√	√	√	
79		Agenda Umum		√	√	√	
80	2 Mei 2023	Update Konversi Mobile Banking BTN ke New Mobile Banking		√	√	√	
81		Presentasi Laporan Final Kajian Pemisahan UUS oleh Konsultan Deloitte		√	√	√	
82		Usulan Organisasi Pengelolaan dan Penjualan Cash Management Kepada Nasabah		√	√	√	
83		Update Progress Implementasi Sentralisasi dan Digitalisasi Tata Kelola Dokumen Kredit Tahun 2023		√	√	√	
84	8 Mei 2023	Pelaksanaan Leadership Forum		√	√	√	
85		Sentralisasi Pengadaan PC dan Laptop		Izin	√	√	
86		Usulan Susunan Direktur Pengganti		Izin	√	√	
87		Update Progress KCP Mitra UMKM		Izin	√	√	
88		Pemenuhan dan Strategi Peningkatan Kualitas SDM Tahun 2023		√	√	√	
89		Kinerja NPL Konsumer dan Prognosa NPL Bulan Mei 2023		√	√	√	
90		Agenda Umum		√	√	√	
91	10 Mei 2023	Performance Review Bulan April 2023		√	√	√	
92		Usulan Perbaikan BPI Collection		Dinas	√	√	
93	11 Mei 2023	Usulan Efisiensi Organisasi CAMD 1 dan CAMD 2		√	√	√	
94	15 Mei 2023	Branch Productivity		√	√	√	
95		Upgrade Core Banking Sharia		√	√	√	
96		Agenda Umum		√	√	√	
97	16 Mei 2023	ALCO		√	√	√	
98	22 Mei 2023	Usulan Kebijakan Restrukturisasi Covid 19 dan Restrukturisasi Berulang		√	√	√	
99		Update Kasus Legal Kasus Cawang 1 dan Cawang 2		√	√	√	
100		Permohonan Ijin Prinsip Sentralisasi Pengadaan PC dan Laptop		√	√	√	
101		Strategi Komunikasi Bank BTN		√	√	√	
102		Materi Usulan Protokol Penyelesaian Aduan Nasabah Melalui Sosial Media dan Media Elektronik		√	√	√	
103	23 Mei 2023	Rapat Komite Pengarah TI (KPTI)		√	√	√	

Kehadiran										Kuorum
	HRG	JSM	ENR	AND	EW	NRP	HP	BY	ASN	
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12
	√	Izin	√	√	√	√	√	√	√	10
	√	Izin	√	√	√	√	√	√	√	10
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	11
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12
	√	Dinas	Dinas	√	√	√	√	√	√	10
	√	Dinas	√	√	Dinas	√	√	√	√	9
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	11
	√	√	√	√	√	Dinas	√	√	√	11
	√	√	√	√	√	Dinas	√	√	√	11
	√	√	√	√	√	Dinas	√	√	√	11
	√	√	√	√	√	Dinas	√	√	√	11
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12

Nomor	Tanggal	Topik					
			HK	NPN	OFR	SWB	
104	29 Mei 2023	ALCO Khusus		√	√	√	
105		Percepatan Proses Pengadaan Barang dan Jasa		Izin	√	√	
106		Denda Regulator Tahun 2022 - 2023		Izin	√	√	
107		Penanganan Permasalahan Hukum Tahun 2023		√	√	√	
108		Materi HCMD		√	√	√	
109		Rapat Komite Manajemen Risiko		√	√	√	
110	5 Juni 2023	Tutup Buku Laporan Keuangan dan Revisi RKAP 2023		√	Izin	√	
111		Update Project Strategic Business Unit		√	Izin	Dinas	
112	12 Juni 2023	Pengelolaan Kredit Pasif		√	√	√	
113		Update Project Percepatan Pembukaan Rekening dan CIF		√	√	√	
114		Revisi RKAP Tahun 2023		√	√	√	
115		Alignmen KPI dan SMK Pegawai		√	√	√	
116		Pelaksanaan Internalisasi Program Budaya Perusahaan Bank BTN		√	√	√	
117	13 Juni 2023	Performance Review Mei Tahun 2023		√	√	Izin	
118		ALCO Khusus Likuiditas		√	√	√	
119	19 Juni 2023	Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)		Izin	√	√	
120		Design Renovasi Lantai 21, 22, 23 dan Lobby Menara BTN		Izin	√	√	
121		Update Klasifikasi Jaringan Kantor Bank BTN		√	√	√	
122		Update Aspek Legal Project Tiger		√	√	√	
123		Percepatan Proses Pengadaan Barang dan Jasa		√	√	√	
124		Agenda Umum		√	√	√	
125	20 Juni 2023	ALCO		√	√	√	
127	26 Juni 2023	Klasifikasi Jaringan Kantor Cabang Bank BTN		√	√	√	
128		Permohonan Ijin Prinsip Sentralisasi Pengadaan <i>Building Management</i> , Permohonan Persetujuan <i>Site Plan</i> Lahan Gandul dan Persetujuan <i>Design</i> Lahan Pringgokusuman		√	√	√	
129		Update Progress Piloting Ekosistem		√	√	√	
130	3 Juli 2023	Usulan Kebijakan Kewenangan Memutus Mutasi		√	√	√	
131		KPR Atlet		√	√	√	
132	4 Juli 2023	Rapat Komite Manajemen Risiko		√	√	√	
133		Laporan Keuangan Posisi Juni 2023		√	√	√	
134		Materi HCMD		√	√	√	
135	10 Juli 2023	Update Branch Productivity		√	√	√	
136		Piloting Perbaikan Pencairan Otomatis		√	√	√	
137		Update Project Al Fatih		√	√	√	
138	11 Juli 2023	ALCO		√	√	√	
139	17 Juli 2023	Update Progress Project Single Relationship Model RM Corporate Segment		Izin	Izin	√	
140		Update BPI SME dan Sentra Proses UMKM		Izin	√	√	
141		Performance Review Juni 2023		Izin	√	√	

Kehadiran										Kuorum
	HRG	JSM	ENR	AND	EW	NRP	HP	BY	ASN	
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	11
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	11
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	11
	√	√	Dinas	√	√	√	√	√	√	9
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	11
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12
	Izin	√	√	√	√	√	√	Izin	√	9
	Izin	√	√	√	√	√	√	Izin	√	9
	Izin	√	√	√	√	√	√	√	√	11
	Izin	√	√	√	√	√	√	√	√	11
	Izin	√	√	√	√	√	√	√	√	11
	Izin	√	√	√	√	√	√	√	√	11
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	11
	√	√	√	√	√	√	√	Cuti	√	11
	√	√	√	√	√	√	√	Cuti	√	11
	Izin	√	√	√	√	√	√	Cuti	√	10
	Izin	√	√	√	√	√	√	Cuti	√	10
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12
	√	√	√	Izin	√	Izin	√	√	√	8
	√	√	√	Izin	√	Izin	√	√	√	9
	√	√	√	Izin	√	Izin	√	√	√	9

Nomor	Tanggal	Topik					
			HK	NPN	OFR	SWB	
142		Internal Direksi		Izin	√	√	
143	21 Juli 2023	Strategi Recovery dan Penyelamatan Kredit Konsumer Pasif		√	√	√	
144	24 Juli 2023	Agenda Umum		√	√	√	
145		Pembahasan Surat OJK Tentang Asset Sales		√	√	√	
146		Kasus Vandalism ATM Wincor		√	√	√	
147		Penyampaian Hasil <i>Cost and Benefit Analysis</i> dan PIP Sentralisasi Pengadaan <i>Building Management</i>		√	√	√	
148	31 Juli 2023	Pemberitaan Direksi BTN		Izin	√	Izin	
149		Pemanfaatan Rumah Dinas Direksi		Izin	√	Izin	
150		<i>Update Progress Project</i> Al Fatih		Izin	√	Izin	
151		Materi HCMD (Talent Mobility)		Izin	√	Izin	
152		Implementasi <i>Job Grade</i> Bank BTN		√	√	√	
153		Agenda Umum		√	√	√	
154	7 Agustus 2023	Agenda Umum		√	√	√	
155		<i>Update Kinerja Kualitas Kredit Konsumer</i>		√	√	√	
156		Pembahasan Pencapaian dan Strategi Penjualan Forex Ritel		√	√	√	
157	9 Agustus 2023	<i>Performance Review</i> Juli 2023		√	√	√	
158		ALCO		√	√	√	
159	11 Agustus 2023	Perubahan Struktur Organisasi CAMD		√	√	√	
160		Materi HCMD (Talent Mobility)		√	√	√	
161	14 Agustus 2023	Kasus Valas KC Banjarmasin		√	√	√	
162		ALCO Terbatas		√	√	√	
163		Protokol <i>Fraud</i>		√	√	√	
164		Penginaan KU 4, KU 6 dan KK Tata Tertib Direksi		√	√	√	
165		Perubahan Renumerasi Direksi dan Dewan Komisaris		√	√	√	
166		Agenda Umum		√	√	√	
167	21 Agustus 2023	<i>Update Portfolio Kredit SME dan Komersial</i>		√	√	√	
168		<i>Update Kasus Valas KC Banjarmasin</i>		√	√	√	
169		Optimalisasi Produktivitas KCP		√	√	√	
170	23 Agustus 2023	Rapat Direksi Bersama Dewan Komisaris		√	√	√	
171	28 Agustus 2023	Agenda Umum		√	√	√	
172		Prioritisasi Pengadaan Barang dan Jasa		√	√	√	
173		Materi HCMD		√	√	√	
174		Usulan Perubahan Kewenangan Sanksi Disiplin Pegawai		√	√	√	
175		Strategi Pencapaian DPK Ritel Tahun 2023		√	√	√	
176	31 Agustus 2023	KPTI		√	√	√	
177	5 September 2023	Agenda Umum		√	√	√	
178		<i>Revamp Website</i> BTN		√	√	√	
179		<i>Update Progress Menara</i> BTN 2		√	√	Izin	

Kehadiran										Kuorum
	HRG	JSM	ENR	AND	EW	NRP	HP	BY	ASN	
	√	√	√	Ijin	√	Ijin	√	√	√	9
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12
	√	√	√	√	√	Dinas	√	Dinas	√	10
	√	√	√	√	√	Dinas	√	Dinas	√	10
	√	√	√	√	√	Dinas	√	Dinas	√	10
	√	√	√	√	√	Dinas	√	Dinas	√	10
	√	√	√	√	√	√	Izin	√	√	9
	√	√	√	√	√	√	Izin	√	√	9
	√	√	√	√	√	√	Izin	√	√	9
	√	√	√	√	√	√	Izin	√	√	9
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12
	Dinas	√	√	Izin	Dinas	√	√	√	√	9
	Dinas	√	√	Izin	Dinas	√	√	√	√	9
	Dinas	√	√	Izin	Dinas	√	√	√	√	9
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12
	Izin	√	√	√	√	√	√	√	√	12
	Izin	√	√	√	√	√	√	√	√	12
	Izin	√	√	√	√	√	√	√	√	12
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12
	Izin	√	√	Izin	√	√	√	√	√	10
	Izin	√	√	Izin	√	√	√	√	√	10
	Izin	√	√	Izin	√	√	√	√	√	9

Nomor	Tanggal	Topik					
			HK	NPN	OFR	SWB	
180		Update Progress Kerjasama Partnership BTN dan IFG Life		√	√	Izin	
181		Rencana Pengembangan Jaringan		√	√	√	
182		Temuan - Temuan Signifikan Bank BTN Tahun 2023		√	√	√	
183	11 September 2023	Nasabah Lembaga Penyangga Likuiditas		√	√	√	
184		Update Project SBU		√	√	√	
185		Percepatan Pencapaian Realisasi KPR Subsidi 2023		√	Dinas	√	
186		Komite Manajemen Risiko		Dinas	√	Dinas	
187	12 September 2023	Performance Review Bulan Agustus 2023		Dinas	√	Dinas	
188		ALCO		√	√	√	
189	25 September 2023	Agenda Umum		√	√	√	
190		Update ATM Jalin dan Merchant EDC		√	√	√	
191		Materi HCMD		√	√	√	
192		ALCO		√	√	√	
193	26 September 2023	Komite Manajemen Risiko		√	Izin	√	
194	2 Oktober 2023	Agenda Umum		√	√	Pendidikan	
195		Update Ketentuan Tata Kelola Bank Umum Terkait Penerbitan POJK 17/2023		√	√	Pendidikan	
196		Aspirasi Insight Market Terkait Harga Saham BBTN		√	√	Pendidikan	
197		Penghimpunan Aspirasi Direksi & SEVP Terkait RKAP 2024		√	√	Pendidikan	
198		Materi HCMD		√	√	Pendidikan	
199		Materi HCMD		√	√	Pendidikan	
200	9 Oktober 2023	Agenda Umum		√	√	Pendidikan	
201		Update Optimalisasi KCP		√	√	Pendidikan	
202		Update terkait Dana Jaminan		√	√	Pendidikan	
203		Antisipasi dan Pengamanan Serangan Ransomware		√	√	Pendidikan	
204	10 Oktober 2023	Performance Review September 2023		√	√	Pendidikan	
205		ALCO		√	√	Pendidikan	
206	16 Oktober 2023	Update Progress Pembelian Menara BTN 2		√	√	√	
207		Rencana Investasi Bank BTN Pada Produk Dana Ventura		√	√	√	
208		Review Struktur Grade BTN dan Kewenangan Memutus Mutasi		√	√	√	
210	24 Oktober 2023	Agenda Umum		√	√	√	
211		Update & Performance Cash Management		√	√	√	
212		Usulan Speed Up Implementasi Struktur Organisasi HCBP Fase End State		√	√	Izin	
213		Komite HCMD		√	√	Izin	
214	30 Oktober 2023	ALCO		√	√	Izin	
215		Sosialisasi Standarisasi Dokumen Perusahaan		√	√	√	
216		Usulan RKAP Tahun 2024		√	√	√	
217	6 November 2023	Desain Seragam Korporat Tahun 2024		√	√	√	
218		Update Kualitas Kredit Konsumer Posisi 31 Oktober 2023		√	√	√	

Kehadiran										Kuorum
	HRG	JSM	ENR	AND	EW	NRP	HP	BY	ASN	
	Izin	√	√	Izin	√	√	√	√	√	9
	√	√	√	√	√	Dinas	√	√	√	11
	√	√	√	√	√	Dinas	√	√	√	11
	√	√	√	√	√	Dinas	√	√	√	11
	√	√	√	√	√	Dinas	√	√	√	11
	√	√	√	√	√	Dinas	√	√	√	11
	Dinas	√	√	√	√	√	√	√	√	9
	Dinas	√	√	√	√	√	√	√	√	9
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12
	√	√	√	√	√	√	√	√	Izin	11
	√	√	√	√	√	√	√	√	Izin	11
	√	√	√	√	√	√	√	√	Izin	11
	√	√	√	Izin	√	√	√	√	Izin	10
	Izin	Izin	√	Izin	√	Izin	√	√	√	7
	Izin	√	√	√	√	√	√	√	√	10
	Izin	√	√	√	√	√	√	√	√	10
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	11
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	11
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	11
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	11
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	11
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	11
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	11
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	11
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	11
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	11
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	11
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	11
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	12
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	11
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	11
	√	√	√	√	√	√	√	√	√	11
	Izin	√	√	√	√	√	√	Pendidikan	Sakit	9
	Izint	√	√	√	√	√	√	Pendidikan	Sakit	9
	√	√	√	√	√	√	√	Izin	√	11
	√	√	√	√	√	√	√	Izin	√	11

Nomor	Tanggal	Topik					
			HK	NPN	OFR	SWB	
219	8 November 2023	Agenda Khusus		√	√	√	
220		Struktur Organisasi Bank BTN Tahun 2024		√	√	√	
221		Rencana Bisnis Tahun 2024		√	√	√	
222	13 November 2023	Rencana Pembelian Menara BTN 2		√	√	√	
223		Rencana Bisnis Dana Pensiun Bank BTN Tahun 2024		√	√	√	
224		Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)		√	√	√	
225	14 November 2023	Agenda Umum		√	√	Dinas	
226		Performance Review Oktober 2023		√	√	√	
227		ALCO		√	√	√	
228	20 November 2023	Agenda Umum		√	√	Dinas	
229		Limited Review Laporan Keuangan Per 30 September 2023		√	√	Dinas	
230		Audit Khusus Kasus Kring KC Palembang		√	√	Dinas	
231		Pembahasan Pengelolaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja		√	√	Dinas	
232		Usulan RAKB Tahun 2024		√	√	Dinas	
233		Komite HCMD		√	√	Dinas	
234	21 November 2023	KPTI		√	√	√	
235	27 November 2023	Penyampaian 10 Inisiatif Strategis Tahun 2024		√	√	√	
236	28 November 2023	ALCO		√	√	√	
237	4 Desember 2023	Roadmap Perbankan Syariah		√	√	√	
238		Laporan Keuangan November 2023		Izin	√	√	
239		Update Progres Kredit Novasi Priyek East Point dan Randu Alas		Izin	√	√	
240		Strategi Penurunan Kol 2		√	√	√	
241		Agenda Umum		√	√	√	
242	11 Desember 2023	Laporan Evaluasi Efektivitas Penerapan Program APU, PPT & PPPSPM 2023 Sebagai Bagian dari Pengawasan Aktif Direksi Sesuai POJK Nomor 8 Tahun 2023		√	√	√	
243		Update Kondisi Likuiditas		√	√	√	
244		Pemindahbukuan Dana Jaminan Ke Rekening Escrow		√	√	√	
245		Tindak Lanjut Pemeriksaan OJK		√	√	√	
246		Agenda Umum		√	√	√	
247	12 Desember 2023	ALCO		√	√	√	
248		Performance Review November 2023		√	√	√	
250	27 Desember 2023	Review Kinerja November dan Prognosa Desember serta Roadmap Dana Pensiun Bank BTN		√	√	√	
251		Naming, Stacking & Desain Menara BTN 2		√	√	√	
252		Review Implementasi Perjanjian Kerja Bersama Tahun 2022		√	√	√	
253		Review POJK 17 Tahun 2023 dalam proses Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Calon Pihak Utama Bank Umum		√	√	√	
254		Update Project Tiger		√	√	√	
255	29 Desember 2023	Cut Off Dana Jaminan		√	√	√	

457

Rapat Direksi Bersama Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2023, agenda, tanggal dan peserta rapat Direksi Bersama Dewan Komisaris adalah sebagai berikut.

Tabel Rapat Direksi Bersama Dewan Komisaris

No.	Tanggal	Topik	Kehadiran																			
			HK	NPN	OFR	SWB	HRG	JSM	ENR	AND	EW	NRP	HP	CH	IL	ABA	AJL	SAS	AH	HTZ	HAS	MYP
1.	22 Februari 2023	Performance Review Januari 2023, Progress Initiative Corporate Plan, Stress Testing, Monitoring Risk Appetite, Risk Tolerance, dan Recovery Plan	√	√		√	√	√	√	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√	Izin
2.	12 April 2023	Performance Review Maret 2023, Progress Initiative Corporate Plan, Stress Testing, Monitoring Risk Appetite, Risk Tolerance, dan Recovery Plan		√*	√*	√	√	√	√	√	√	√	√*	√	√	√	Sakit	√	√	Izin	√	√
3.	21 Juni 2023	Performance Review Bankwide dan UUS, Monitoring Risk Appetite, Risk Tolerance, dan Recovery Plan Bankwide dan UUS, Progress Initiative Corporate Plan, Revisi RBB dan RKAP		√	√	√	Izin	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Sakit	√	√	√	√	√
4.	23 Agustus 2023	Performance Review Bankwide dan UUS, Monitoring Risk Appetite, Risk Tolerance, dan Recovery Plan Bankwide dan UUS, Progress Initiative Corporate Plan		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		√	√	Izin	√	Izin
5.	18 Oktober 2023	Performance Review Bankwide dan UUS, Monitoring Risk Appetite, Risk Tolerance, dan Recovery Plan, Progress Initiative Corporate Plan, Evaluasi dan Monitoring Penyelenggaraan Produk Aktivitas Baru dan Kegiatan untuk kepentingan Bank		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		√	Izin	√	√	Izin
6.	20 Desember 2023	Performance Review Bankwide disertai Prognosis Pencapaian KPI, Performance Review UUS disertai Prognosis Pencapaian KPI, Monitoring Risk Appetite, Risk Tolerance, dan Recovery Plan Bankwide dan UUS, Progress Initiative Corporate Plan		Izin	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Izin	√	√		√	Izin	√	√	Izin

*) sebagai observer sejak diangkat di RUPS sampai dengan efektif 7 Juni 2023

**) berhenti masa jabatan sejak tanggal 12 Agustus 2023 karena meninggal dunia

Agenda, tanggal dan peserta rapat Dewan Komisaris bersama Direksi dapat dilihat pada Rapat Dewan Komisaris dalam Bab Tata Kelola Perusahaan pada Laporan Tahunan ini.

Frekuensi dan Kehadiran Rapat Direksi

Jumlah masing-masing rapat

Nama	Jabatan	Rapat Direksi			Rapat Gabungan Direksi bersama Dewan Komisaris			RUPS		
		Jumlah dan Persentase Kehadiran			Jumlah dan Persentase Kehadiran			Jumlah dan Persentase Kehadiran		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase
Haru Koesmahargo*	Direktur Utama	34	28	80%	2	2	100%	2	2	100%
Nixon L.P. Napitupulu**	Direktur Utama	225	223	87%	12	11	92%	2	2	100%
Oni Febriarto Rahardjo***	Wakil Direktur Utama	218	207	95%	11	10	91%	-	-	-
Andi Nirwoto	Direktur IT and Digital	255	231	91%	12	12	100%	2	2	100%
Elisabeth Novie Riswanti	Direktur Assets Management	255	240	94%	12	12	100%	2	2	100%
Jasmin	Direktur Distribution and Funding	255	231	91%	11	10	91%	2	2	100%
Setiyo Wibowo	Direktur Risk Management	255	216	85%	12	12	100%	2	2	100%
Hirwandi Gafar	Direktur Consumer	255	222	87%	12	9	75%	2	2	100%
Nofry Rony Poetra	Direktur Finance	255	227	89%	12	11	92%	2	2	100%
Eko Waluyo	Direktur Human Capital, Compliance, and Legal	255	241	95%	12	12	100%	2	2	100%
Hakim Putratama***	Direktur Institutional Banking	218	200	92%	10	10	100%	-	-	-

*Berhenti menjabat sejak 16 Maret 2023 berdasarkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun 2023.

** Pengalihan penugasan semula sebagai Wakil Direktur Utama menjadi Direktur Utama sejak 16 Maret 2023 dan mendapat pernyataan efektif dari OJK terhitung mulai tanggal 07 Juni 2023.

***Mulai menjabat sejak 16 Maret 2023 dan mendapat pernyataan efektif dari OJK terhitung mulai tanggal 07 Juni 2023.

Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Anggota Direksi

Kebijakan terkait pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Direksi telah diatur dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*). Program pendalaman pengetahuan bagi anggota Direksi meliputi:

1. Program pendalaman pengetahuan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja Direksi.
2. Setiap anggota Direksi yang mengikuti program pendalaman pengetahuan seperti seminar, dan/atau pelatihan diwajibkan untuk menyajikan presentasi kepada anggota lainnya dalam berbagi informasi dan pengetahuan.
3. Materi yang diterima dari program pendalaman pengetahuan harus didokumentasikan dengan baik dalam suatu bagian tersendiri. Tanggung jawab dokumentasi pada Sekretaris Perusahaan. Materi tersebut harus tersedia jika suatu saat diperlukan.

Adapun pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti oleh Direksi selama tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Nama	Jabatan	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
Haru Koesmahargo*	Direktur Utama	<i>Workshop & Refreshment Asecor Professional Qualification & Penyerahan SK Asesor LPPI periode 2023</i>	Jakarta, 10 Januari 2023	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia
		Pencegahan Korupsi di Lingkungan BUMN	Jakarta, 11 Januari 2023	Kementerian BUMN dan KPK
		Penguatan Sektor Jasa Keuangan dalam Menjaga Pertumbuhan Ekonomi	Jakarta, 6 Februari 2023	Otoritas Jasa Keuangan
Nixon L.P. Napitupulu**	Direktur Utama	<i>Leadership Forum "Envisioning Culture For Leader"</i>	Semarang, 12 -13 Mei 2023	PwC dan Korn Ferry
		<i>Refreshment Treasury Dealer Advance</i>	Semarang, 7 Juni 2023	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia
		<i>Asean Global Leadership Program (AGLP) - SRW&Co "Leading Innovation in Global Economic Recovery"</i>	Chicago, USA, 18 – 22 September 2023	SRW&Co
Oni Febriarto Rahardjo***	Wakil Direktur Utama	<i>Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5</i>	Jakarta, 31 Maret 2023	Mahesa Prima Solusindo
		<i>Risk Management Class for Executive</i>	Jakarta, 12 April 2023	Strategic Development Group
		<i>Pelatihan Bank Management Executive Overview for BOD</i>	Jakarta, 27 April 2023	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia
		<i>Leadership Forum "Envisioning Culture For Leader"</i>	Semarang, 12 -13 Mei 2023	PwC dan Korn Ferry
		<i>GRC Masterclass Program 2023 "Sosialisasi Pemeringkatan BUMN & Anak Perusahaan BUMN"</i>	Jakarta, 14 September 2023	BUMN School of Excellence
		<i>GRC Masterclass Program 2023 "ESG for Boards – Governance of ESG"</i>	Jakarta, 27 September 2023	BUMN School of Excellence
		<i>IICD - Special Directorship Program 2023</i>	Bali, 13 – 14 Desember 2023	Indonesian Institute for Corporate Directorship
Andi Nirwoto	Direktur IT and Digital	<i>Business English Preparation</i>	Jakarta, 9 – 10 April 2023	SUN Education
		<i>Leadership Forum "Envisioning Culture For Leader"</i>	Semarang, 12 -13 Mei 2023	PwC dan Korn Ferry
		<i>Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5</i>	Jakarta, 22 Mei 2023	Mahesa Prima Solusindo
		<i>GRC Masterclass Program 2023 "Sosialisasi Pemeringkatan BUMN & Anak Perusahaan BUMN"</i>	Jakarta, 14 September 2023	BUMN School of Excellence
		<i>GRC Masterclass Program 2023 "Integrated Information For Supervisory Board"</i>	Jakarta, 5 Oktober 2023	BUMN School of Excellence
		<i>IMD Executive Education "Digital Transformation for Boards"</i>	Switzerland, 14 – 25 November 2023	International Management Development
Elisabeth Novie Riswanti	Direktur Assets Management	<i>Leadership Forum "Envisioning Culture For Leader"</i>	Semarang, 12 -13 Mei 2023	PwC dan Korn Ferry
		<i>GRC Masterclass Program 2023 "Integrated Information For Supervisory Board"</i>	Jakarta, 5 Oktober 2023	BUMN School of Excellence
		<i>IICD - Special Directorship Program 2023</i>	Bali, 13 – 14 Desember 2023	Indonesian Institute for Corporate Directorship

Nama	Jabatan	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
Jasmin	Direktur Distribution and Funding	Leadership Forum "Envisioning Culture For Leader"	Semarang, 12 -13 Mei 2023	PwC dan Korn Ferry
		GRC Masterclass Program 2023 "Integrated Information For Supervisory Board"	Jakarta, 5 Oktober 2023	BUMN School of Excellence
Setiyo Wibowo	Direktur Risk Management	Leadership Forum "Envisioning Culture For Leader"	Semarang, 12 -13 Mei 2023	PwC dan Korn Ferry
		BCG's Strategy Advantage Roundtable: Building Resilience in Times of Uncertainty	Jakarta, 18 Juli 2023	Boston Consulting Indonesia
		SAS Innovate 2023	Singapore, 3 Agustus 2023	SAS Institute
		GRC Masterclass Program 2023 "Pre IPO dan Post IPO - Peningkatan dan penerbitan efek bersifat utang & sukuk (EBUS) "	Jakarta, 10 Agustus 2023	BUMN Leadership & Management Institute
		Leading Future-Ready Teams	Ann Arbor, Michigan, USA, 2 – 5 Oktober 2023	Michigan Ross - Michigan University
Hirwandi Gafar	Direktur Consumer	Pelatihan Chief Business Officer Development (CBOD)	Jakarta, 10 – 11 Februari 2023	BUMN Leadership & Management Institute
		Leadership Forum "Envisioning Culture For Leader"	Semarang, 12 -13 Mei 2023	PwC dan Korn Ferry
Nofry Rony Poetra	Direktur Finance	Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5	Jakarta, 31 Maret 2023	Mahesa Prima Solusindo
		Leadership Forum "Envisioning Culture For Leader"	Semarang, 12 – 13 Mei 2023	PwC dan Korn Ferry
		Global ESG Corporate Access	Singapore, 27 Juni 2023	BNP Paribas
		GRC Masterclass Program 2023 "Pre IPO dan Post IPO - Peningkatan dan penerbitan efek bersifat utang & sukuk (EBUS) "	Jakarta, 10 Agustus 2023	BUMN Leadership & Management Institute
		GRC Masterclass Program 2023 "Sosialisasi Peningkatan BUMN & Anak Perusahaan BUMN"	Jakarta, 14 September 2023	BUMN School of Excellence
		GRC Masterclass Program 2023 "ESG for Boards – Governance of ESG"	Jakarta, 27 September 2023	BUMN School of Excellence
		Wharton Executive Education "CEO Academy"	USA, 15 – 16 November 2023	Wharton Business School
Eko Waluyo	Direktur Human Capital, Compliance, and Legal	Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko Level 5	Jakarta, 31 Maret 2023	Mahesa Prima Solusindo
		Pendalaman ASEAN CG Scorecard IICD	Jakarta, 18 April 2023	Indonesian Institute for Corporate Directorship
		Asean Global Leadership Program (AGLP) - SRW&Co "Shaping The Future with Inspiring Leadership"	Barcelona, 15 – 19 Mei 2023	SRW&Co
		Leadership Forum "Envisioning Culture For Leader"	Semarang, 12 – 13 Mei 2023	PwC dan Korn Ferry
		GRC Masterclass Program 2023 "Pre IPO dan Post IPO - Peningkatan dan penerbitan efek bersifat utang & sukuk (EBUS) "	Jakarta, 10 Agustus 2023	BUMN Leadership & Management Institute
		GRC Masterclass Program 2023 "Sosialisasi Peningkatan BUMN & Anak Perusahaan BUMN"	Jakarta, 14 September 2023	BUMN School of Excellence
		Chief Human Resources Officer 2023	Jakarta, 20 September 2023	BUMN School of Excellence

Nama	Jabatan	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi / Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
		<i>Certified Anti Fraud Professional</i>	Jakarta, 22 September 2023	Asia Anti Fraud
		Seminar “Dampak Pengatribusian Imbalan Kerja Berdasarkan PSAK 24 Paragraf 70 Terhadap Pencatatan Imbalan Pasca Kerja Setelah Pemberlakuan UU Cipta Kerja”	Jakarta, 24 September 2023	Ikatan Akuntan Indonesia
		GRC Masterclass Program 2023 “ESG for Boards – Governance of ESG”	Jakarta, 27 September 2023	BUMN School of Excellence
		GRC Masterclass Program 2023 “GC Methodology and Environmental and Social Management System”	Jakarta, 25 Oktober 2023	BUMN School of Excellence
		Sosialisasi Pencegahan Tindak Pidana Sektor Jasa Keuangan Kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan Sektor Perbankan di DKI Jakarta	Jakarta, 4 Desember 2023	Otoritas Jasa Keuangan
		IICD - <i>Special Directorship Program 2023</i>	Bali, 13 – 14 Desember 2023	Indonesian Institute for Corporate Directorship
Hakim Putratama***	Direktur Institutional Banking	Pelatihan <i>Bank Management Executive Overview for BOD</i>	Jakarta, 8 – 9 April 2023	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia
		<i>Risk Management Class for Executive</i>	Jakarta, 12 April 2023	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia
		<i>Leadership Forum “Envisioning Culture For Leader”</i>	Semarang, 12 – 13 Mei 2023	PwC dan Korn Ferry
		GRC Masterclass Program 2023 “ <i>Integrated Information For Supervisory Board</i> ”	Jakarta, 5 Oktober 2023	BUMN School of Excellence
		Executive Education HBS “ <i>Strategy: Building and Sustaining Competitive Advantage</i> ”	Boston, Massachusetts, USA, 12 – 15 Desember 2023	Harvard Business School

*Berhenti menjabat sejak 16 Maret 2023 berdasarkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun 2023.

** Pengalihan penugasan semula sebagai Wakil Direktur Utama menjadi Direktur Utama sejak 16 Maret 2023 dan mendapat pernyataan efektif dari OJK terhitung mulai tanggal 07 Juni 2023.

***Mulai menjabat sejak 16 Maret 2023 dan mendapat pernyataan efektif dari OJK terhitung mulai tanggal 07 Juni 2023.

Program Orientasi Bagi Direksi Baru

Perseroan senantiasa mengadakan Program Orientasi atau Pengenalan bagi anggota Direksi yang baru diangkat agar saling mengenal dan menjalin kerja sama sebagai satu tim yang solid, komprehensif, efektif. Program orientasi tersebut juga bertujuan untuk memberikan pengetahuan mengenai kondisi Perseroan secara umum. Program pengenalan Direksi, meliputi:

1. Pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dan *Business Ethics* di Perseroan.
2. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi serta hal lain yang tidak diperbolehkan.
3. Gambaran mengenai Perseroan berkaitan dengan tujuan, sifat dan lingkup kegiatan Perseroan, kinerja keuangan, strategi, rencana jangka pendek dan jangka panjang Perseroan, risiko, pengendalian internal dan masalah-masalah strategis lainnya.
4. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal serta Komite Audit.

Selama tahun 2023, dilaksanakan program orientasi kepada anggota Direksi baru sebagai berikut:

No.	Nama Direktur	Jabatan	Agenda	Tanggal Pelaksanaan
1.	Oni Febriarto Rahardjo	Wakil Direktur Utama	Tujuan dan Lingkup Kegiatan Bank sesuai Anggaran Dasar	28 Maret 2023
			Kinerja Keuangan, Strategi, Rencana Usaha Jangka Pendek dan Jangka Panjang, Posisi Kompetitif	28 Maret 2023
			Sistem Pengendalian Internal, Audit Internal, dan Eksternal	29 Maret 2023
			Fasilitas Direksi	29 Maret 2023
			Compliance, GCG, Tata Hubungan Kerja Dewan Komisaris dan Direksi, Tata Tertib Kerja Direksi	30 Maret 2023
			Manajemen Risiko dan Tingkat Kesehatan Bank	31 Maret 2023
			Budaya Perusahaan	30 Maret 2023
			Tata Kelola Kebijakan dan Prosedur	28 Maret 2023
2.	Hakim Putratama	Direktur Banking Institutional	Tujuan dan Lingkup Kegiatan Bank sesuai Anggaran Dasar	28 Maret 2023
			Kinerja Keuangan, Strategi, Rencana Usaha Jangka Pendek dan Jangka Panjang, Posisi Kompetitif	28 Maret 2023
			Sistem Pengendalian Internal, Audit Internal, dan Eksternal	28 Maret 2023
			Fasilitas Direksi	28 Maret 2023
			Compliance, GCG, Tata Hubungan Kerja Dewan Komisaris dan Direksi, Tata Tertib Kerja Direksi	28 Maret 2023
			Manajemen Risiko dan Tingkat Kesehatan Bank	28 Maret 2023
			Budaya Perusahaan	28 Maret 2023
			Tata Kelola Kebijakan dan Prosedur	28 Maret 2023

Pelaksanaan Tugas Direksi

Sepanjang tahun 2023, seluruh Anggota Direksi telah melakukan tugas kepengurusan dan pelaporan pertanggungjawabannya disampaikan kepada Dewan Komisaris dalam bentuk:

1. Laporan *Performance Review*
2. Laporan Tingkat Kesehatan Bank
3. Laporan Pemenuhan Fungsi Kepatuhan
4. Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan
5. Laporan Tindak Lanjut Temuan Audit

Direksi juga telah melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi selama tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan kriteria tata kelola perusahaan sesuai POJK dan Peraturan Menteri BUMN.
2. Melaksanakan tata kelola perusahaan sesuai kriteria ASEAN CG *Scorecard*.
3. Sosialisasi dan implementasi *Code of Conduct*.
4. Laporan gratifikasi kepada KPK.
5. *Self Assessment* Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan sesuai dengan POJK.
6. Menyusun dan menyampaikan Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan.

Penilaian Kinerja Komite di Bawah Direksi, Sekretaris Perusahaan, Unit Internal Audit, Unit Manajemen Risiko dan Dasar Penilaiannya

Perseroan membentuk dan menetapkan struktur serta keanggotaan Komite-Komite di bawah Direksi dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas Direksi. Komite-Komite tersebut berperan dalam mempermudah *monitoring* dan menciptakan efektivitas pemecahan masalah serta pengembangan aspek yang dipandang strategis oleh Perseroan sesuai peraturan yang berlaku. Komite-Komite tersebut meliputi:

1. Komite Manajemen Risiko
2. *Asset and Liability Management Committee* (ALCO)
3. Komite Kebijakan Perkreditan
4. Komite Kredit
5. Komite *Human Capital*
6. Komite Pengarah Teknologi Infomasi (TI)
7. Komite Pengarah Transformasi
8. Komite Bisnis
9. Komite *Environmental, Social and Governance* (ESG)

Untuk mengukur efektifitas kinerja komite di bawah Direksi dalam membantu Direksi menjalankan pengurusan perusahaan maka dilakukan penilaian terhadap di bawah Direksi. Prosedur penilaian kinerja komite di bawah Direksi dilakukan oleh Direksi secara periodik dengan kriteria penilaian atas kinerja Komite di bawah Direksi yaitu pemenuhan pelaksanaan rapat serta kehadiran dalam rapat selama tahun buku. Selama tahun 2023, Direksi menilai bahwa komite-komite di bawah Direksi telah menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik.

Selain dibantu oleh Komite di Bawah Direksi, dalam melaksanakan tugasnya Direksi juga dibantu oleh unit penunjang antara lain Sekretaris Perusahaan, Unit Internal Audit dan Unit Manajemen Risiko. Penilaian kinerja untuk Sekretaris Perusahaan, Unit Internal Audit dan Unit Manajemen Risiko dinilai berdasarkan *Key Performance Indicator* (KPI) yaitu Target Utama, Kolaborasi, Inisiatif dan lainnya. Pencapaian KPI tahun 2023 untuk Sekretaris Perusahaan, Unit Internal Audit, dan Unit Manajemen Risiko mencapai lebih dari 100%. Sekretaris Perusahaan, Unit Internal Audit dan Unit Manajemen Risiko telah melaksanakan tugasnya dengan baik.

Mekanisme Pengunduran Diri dan Pemberhentian Direksi

RUPS dapat memberhentikan para anggota Direksi sewaktu-waktu, apabila dengan alasan yang bersangkutan melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Tidak/kurang dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak manajemen.
2. Tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik.
3. Melanggar ketentuan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan.

4. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau negara.
5. Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepalutan yang seharusnya dihormati sebagai Direksi.
6. Dinyatakan bersalah dengan keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
7. Mengundurkan diri.
8. Alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan dan tujuan Perseroan.

Keputusan pemberhentian karena alasan tersebut di atas diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.

Dalam hal antara anggota Direksi atau Antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris terdapat hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat ketiga, baik menurun garis lurus maupun garis ke samping atau hubungan semenda (menantu atau ipar), maka RUPS berwenang memberhentikan salah seorang di antara mereka.

Seorang anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang mengundurkan diri, maka anggota Direksi yang bersangkutan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada perseroan.

Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri tersebut. Jabatan Anggota Direksi berakhir apabila:

1. Pengunduran dirinya telah efektif.
2. Meninggal dunia.
3. Masa jabatannya berakhir.
4. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
5. Dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan.
6. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan termasuk pada rangkap jabatan yang dilarang.

Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya apabila mereka bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar atau terdapat indikasi melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang diatur oleh Anggaran Dasar. Keputusan penguatan atau pencabutan pemberhentian sementara anggota Direksi oleh anggota Dewan Komisaris ditetapkan dalam RUPS.

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris merupakan pihak yang bertugas atau berfungsi melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan dan Pemegang Saham khususnya serta pemangku kepentingan pada umumnya.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris yang telah diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan untuk kepentingan Perseroan atas kebijakan dan jalannya pengurusan oleh Direksi, memberikan nasihat kepada Direksi, dan bertanggung jawab atas pengawasan tersebut, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan RUPS.
2. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dengan itikad baik, dengan memperhatikan kepentingan para Pemegang Saham, dan dengan prinsip kehati-hatian.
3. Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi serta kebijakan strategis Perseroan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS.
4. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut Direksi atas temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Perseroan, auditor ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas dan lembaga lain.
5. Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan RUPS.
6. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Perseroan, kecuali:
 - a. penyediaan dana kepada pihak terkait sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum pemberian kredit dan penyediaan dana besar bagi bank umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum penyaluran dana dan penyaluran dana besar bagi bank umum syariah; dan
 - b. hal lain yang ditetapkan dalam anggaran dasar Perseroan atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pengambilan keputusan kegiatan operasional Perseroan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada angka 6 merupakan bagian dari tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan Perseroan.
8. Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditemukan:
 - a. pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan, perbankan, dan yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan; dan/atau
 - b. keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Perseroan.
9. Dewan Komisaris mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan dan memberikan pendapat, saran, dan/atau penjelasan kepada RUPS termasuk namun tidak terbatas pada pemegang saham pengendali mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perseroan.
10. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya, kecuali dapat membuktikan hal-hal sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar.



Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris Utama

Selain sebagaimana tugas sebagai anggota Dewan Komisaris, Komisaris Utama yang merupakan koordinator Dewan Komisaris juga memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Memimpin rapat sebagaimana diatur dalam anggaran dasar;
2. Memfasilitasi diskusi yang konstruktif;
3. Menciptakan budaya etika kerja termasuk memelihara hubungan yang efektif dan sehat dengan Direksi; dan
4. Memberikan saran kepada anggota Dewan Komisaris terkait pelaksanaan tugas dan kewajiban Dewan Komisaris.

Wewenang Dewan Komisaris

Wewenang Dewan Komisaris yang telah diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris menerima dan melaksanakan kewenangan yang diserahkan dan/atau diberikan kepada Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.
2. Dewan Komisaris berwenang memberikan persetujuan atas rencana strategis, kegiatan, laporan, dan/atau dokumen lain yang disusun oleh Direksi dan membutuhkan persetujuan Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan ketentuan dalam anggaran dasar, peraturan perundang-undangan, dan penetapan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.
3. Dewan Komisaris berhak memeriksa dokumen Perseroan, memeriksa kekayaan Perseroan, mencocokkan keadaan uang kas dan surat berharga, memasuki pekarangan dan bangunan yang dikuasai dan/atau dipergunakan oleh Perseroan, serta mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah, sedang, dan akan dijalankan oleh Direksi.
4. Meminta keterangan dan/atau penjelasan dari Direksi dan/atau Pejabat Eksekutif mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan termasuk meminta Direksi dan/atau Pejabat Eksekutif dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri Rapat Dewan Komisaris.
5. Dewan Komisaris berwenang mengusulkan kepada RUPS atas penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit.
6. Dewan Komisaris berwenang mengajukan calon anggota Direksi yang baru kepada Pemegang Saham berdasarkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi untuk diputuskan dalam RUPS.
7. Dewan Komisaris berwenang memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
8. Dewan Komisaris berwenang menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban Perseroan, jika dianggap perlu dan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
9. Dewan Komisaris berwenang melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

10. Dewan Komisaris berwenang menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan.
11. Dewan Komisaris berwenang berhak diberikan honorarium, tunjangan dan/atau fasilitas termasuk tantiem dan santunan purnajabatan yang sejenis dan jumlahnya ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.

Keputusan yang Perlu Mendapat Persetujuan Dewan Komisaris

Dengan memperhatikan Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan dan ketentuan di bidang Pasar Modal, perbuatan-perbuatan Direksi yang perlu mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris:

1. Melepaskan/memindahtangankan dan/atau mengagunkan aset Perseroan dengan kriteria dan nilai melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris, kecuali aset yang dicatat sebagai persediaan, dengan memperhatikan ketentuan di bidang pasar modal dan sektor perbankan.
2. Mengadakan kerja sama dengan badan usaha atau pihak lain, dalam bentuk kerja sama operasi (KSO), kerja sama usaha (KSU), kerja sama lisensi, Bangun Guna Serah (*Build, Operate and Transfer/BOT*), Bangun Serah Guna (*Build, Transfer and Operate/BTO*), Bangun Guna Milik (*Build, Operate and Own/BOO*) dan perjanjian-perjanjian lain yang mempunyai sifat yang sama yang jangka waktunya ataupun nilainya melebihi dari yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
3. Menetapkan dan mengubah logo Perseroan.
4. Menetapkan struktur organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Direksi.
5. Melakukan penyertaan modal dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris pada perseroan lain, anak perusahaan, dan perusahaan patungan yang tidak dalam rangka penyelamatan piutang dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal.
6. Mendirikan anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal.
7. Mengusulkan wakil Perseroan untuk menjadi calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada perusahaan patungan dan/atau anak perusahaan yang memberikan kontribusi signifikan kepada Perseroan dan/atau bernilai strategis yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
8. Melepaskan penyertaan modal dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris pada perseroan lain, anak perusahaan, dan perusahaan patungan yang tidak dalam rangka penyelamatan piutang dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal.

9. Melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, dan pembubaran anak perusahaan dan perusahaan patungan dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal.
10. Melakukan tindakan-tindakan yang termasuk dalam transaksi material sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris, kecuali tindakan tersebut termasuk dalam transaksi material yang dikecualikan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
11. Tindakan-tindakan yang belum ditetapkan dalam RKAP.
12. Melakukan perbuatan mengalihkan termasuk menjual, melepaskan hak untuk menagih dan/atau tidak menagih lagi atas:
 - a. Piutang pokok macet yang telah dihapus buku dalam rangka penyelesaian kredit baik untuk sebagian maupun keseluruhan.
 - b. Selisih antara nilai piutang pokok macet yang telah dihapus buku dengan nilai pengalihan termasuk penjualan atau dengan nilai pelepasan hak yang pelaksanaannya berdasarkan kebijakan Direksi yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan dalam jumlah plafon (limit) hapus tagih yang telah ditetapkan RUPS yang akan tetap berlaku sampai dengan adanya penetapan plafon (limit) baru oleh RUPS.
2. Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi lembaga jasa keuangan.
3. Anggota Dewan Komisaris yang telah memenuhi persyaratan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan selama menjabat wajib memiliki:
 - a. Integritas;
 - b. Kompetensi; dan
 - c. Reputasi yang baik.
4. Anggota Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) orang wajib berdomisili di Indonesia.
5. Calon Komisaris Independen harus memiliki:
 - a. Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatan sebagai Komisaris Independen; dan
 - b. Pengalaman di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan.
6. Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif atau pihak yang mempunyai hubungan dengan Perseroan yang dapat memengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen wajib menjalani masa tunggu paling singkat 1 (satu) tahun sebelum menjadi Komisaris Independen.
7. Masa tunggu bagi:
 - a. Mantan Direktur Utama pada Perseroan; dan
 - b. Mantan anggota Direksi yang membawahkan fungsi pengawasan atau Pejabat Eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan pada Perseroan, paling singkat 6 (enam) bulan sebelum menjadi Komisaris Independen pada Perseroan.
8. Komisaris Independen tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan, hubungan afiliasi, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Perseroan yang dapat memengaruhi kemampuan untuk bertindak independen.
9. Komisaris Independen tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.
10. Komisaris Independen tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan.
11. Komisaris dapat beralih menjadi Komisaris Independen pada Perseroan atau kelompok usaha Perseroan dengan memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen.
12. Komisaris yang akan beralih menjadi Komisaris Independen pada Perseroan wajib menjalani masa tunggu paling singkat 1 (satu) tahun.
13. Peralihan dari Komisaris menjadi Komisaris Independen wajib memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan melalui penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi lembaga jasa keuangan.

Masa Jabatan Dewan Komisaris

Para anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya, dengan syarat tidak boleh melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan para anggota Dewan Komisaris sebelum masa jabatannya berakhir.

Setelah masa jabatannya berakhir, para anggota Dewan Komisaris dapat diangkat kembali oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk satu kali masa jabatan.

Persyaratan Anggota Dewan Komisaris

Persyaratan anggota Dewan Komisaris yang diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Anggota Dewan Komisaris merupakan orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat sesuai ketentuan pada anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris

Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang diatur dalam Keputusan Dewan Komisaris nomor 05/KOM/ BTN/2023 tanggal 13 Desember 2023 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris disusun berdasarkan prinsip-prinsip hukum korporasi, ketentuan Anggaran Dasar, peraturan dan ketentuan perundang-undangan, arahan Pemegang Saham, serta praktik-praktik terbaik penerapan tata kelola perusahaan. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dilakukan peninjauan secara berkala.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dapat memberikan panduan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dengan lebih terarah dan efektif serta dapat digunakan sebagai salah satu alat penilaian kinerja Dewan Komisaris. Adapun isi Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

BAB I	Ketentuan Umum	Pasal 1	Istilah dan Pengertian
BAB II	Keanggotaan	Pasal 2	Struktur dan Komposisi
		Pasal 3	Kriteria Keanggotaan
		Pasal 4	Pengangkatan
		Pasal 5	Masa Jabatan
		Pasal 6	Rangkap Jabatan
		Pasal 7	Pemberhentian
BAB III	Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang	Pasal 8	Tugas dan Kewajiban
		Pasal 9	Wewenang
BAB IV	Rapat	Pasal 10	Jenis Rapat
		Pasal 11	Pemanggilan dan Penyelenggaraan Rapat
		Pasal 12	Materi Rapat
		Pasal 13	Pimpinan Rapat
		Pasal 14	Pemanggilan Keputusan
		Pasal 15	Dokumentasi Rapat
BAB V	Mekanisme Kerja	Pasal 16	Etika Kerja
		Pasal 17	Larangan
		Pasal 18	Perencanaan Kerja
		Pasal 19	Pembagian Kerja
		Pasal 20	Waktu Kerja
		Pasal 21	Penilaian dan Evaluasi Kerja
		Pasal 22	Pelaporan dan Pertanggungjawaban
		Pasal 23	Pola Hubungan Kerja Dewan Komisaris dan Direksi
BAB VI	Organ Pendukung	Pasal 24	Sekretaris Dewan Komisaris
		Pasal 25	Komite Di Bawah Dewan Komisaris
BAB VII	Pengembangan Kompetensi Berkelanjutan	Pasal 26	Pengembangan Kompetensi
		Pasal 27	Pelatihan
		Pasal 28	Sertifikasi
BAB VIII	Lain-lain	Pasal 29	Hubungan dengan Pemangku Kepentingan

Pembidangan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris

Adapun pembidangan tugas pengawasan Dewan Komisaris sebagai berikut.

Tabel Pembidangan Tugas Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Bidang Tugas
Chandra M. Hamzah	Komisaris Utama/ Independen	Remunerasi dan Nominasi
Iqbal Latanro	Wakil Komisaris Utama/ Independen	Audit (Internal & Eksternal), Remunerasi dan Nominasi
Armand B. Arief	Komisaris Independen	Manajemen Risiko, Kepatuhan, Remunerasi dan Nominasi
Ahdi Jumhari Luddin*	Komisaris Independen	Audit (Internal & Eksternal), Remunerasi dan Nominasi
Sentot A. Sentausa	Komisaris Independen	Audit (Internal & Eksternal), Remunerasi dan Nominasi
Andin Hadiyanto	Komisaris	Audit (Internal & Eksternal), Remunerasi dan Nominasi
Herry Trisaputra Zuna	Komisaris	Manajemen Risiko, Kepatuhan, Remunerasi dan Nominasi
Himawan Arief Sugoto	Komisaris	Manajemen Risiko, Kepatuhan, Remunerasi dan Nominasi
Mohamad Yusuf Permana**	Komisaris	Remunerasi dan Nominasi

* Berhenti masa jabatan karena meninggal dunia tanggal 12 Agustus 2023

** Diangkat berdasarkan RUPSLB tanggal 11 Januari 2023 dan efektif sejak 07 Juni 2023.

Kebijakan Rangkap Jabatan Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:

1. Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta.
2. Pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif dan/atau kepala daerah/wakil kepala daerah.
3. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

Tabel Rangkap Jabatan Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Jabatan pada Perusahaan/Instansi Lain	Nama Perusahaan/Instansi Lain
Chandra M. Hamzah	Komisaris Utama/ Independen	Partner	Assegaf Hamzah and Partners Lawfirm
Iqbal Latanro	Wakil Komisaris Utama/ Independen	-	-
Armand B. Arief	Komisaris Independen	Komisaris Independen	PT Cardig Aero Services Tbk
Ahdi Jumhari Luddin*	Komisaris Independen	-	-
Sentot A. Sentausa	Komisaris Independen	-	-
Andin Hadiyanto	Komisaris	Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK)	Kementerian Keuangan
		Plt. Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan	Kementerian Keuangan
Himawan Arief Sugoto	Komisaris	Penasihat Utama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Bidang Ekonomi Pertanahan	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Herry Trisaputra Zuna	Komisaris	Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Mohamad Yusuf Permana**	Komisaris	Kepala Biro Protokol	Kementerian Sekretariat Negara

* Berhenti masa jabatan karena meninggal dunia tanggal 12 Agustus 2023.

** Diangkat berdasarkan RUPSLB tanggal 11 Januari 2023 dan efektif sejak 07 Juni 2023.



Pengelolaan Benturan Kepentingan Dewan Komisaris

Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan kegiatan operasional perbankan, kecuali untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan hal-hal lain yang diatur dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan perundang-undangan. Keterlibatan atau persetujuan Dewan Komisaris dimaksud, tidak meniadakan tanggung jawab Direksi dalam pelaksanaan kepengurusan Bank. Dewan Komisaris juga dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dan/atau bertentangan dengan peraturan perundangan dan etika jabatan. Oleh karena itu Dewan Komisaris wajib menghindari terjadinya benturan kepentingan dengan senantiasa melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengutamakan kepentingan Perseroan dan tidak mengurangi keuntungan Perseroan dalam hal terjadi benturan kepentingan;
2. Melakukan pengungkapan kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada Perseroan maupun Perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan luar negeri;
3. Melakukan pengungkapan hubungan kekeluargaan, hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, pemegang saham pengendali Perseroan, dan/atau pihak lainnya dalam rangka bisnis Perseroan;
4. Melakukan pengungkapan adanya jabatan rangkap;
5. Melakukan pengungkapan dalam hal pengambilan keputusan tetap harus diambil pada kondisi adanya benturan kepentingan dan anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tidak boleh melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan Perseroan yang berkaitan dengan hal tersebut;

6. Tidak meminta, menerima, mengizinkan, dan/atau menyetujui untuk menerima imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang, barang berharga, dan/atau segala sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis atau manfaat lain, untuk keuntungan pribadi, keluarga, dan pihak lain, dalam pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan dan kegiatan lain terkait dengan Perseroan.

Komisaris Independen

Komposisi anggota Dewan Komisaris Perseroan Per 31 Desember 2023 berjumlah 8 (delapan) orang anggota dengan 4 (empat) orang di antaranya sebagai Komisaris Independen atau sebanyak 50% (lima puluh persen) dari total anggota Dewan Komisaris yang ada. Komposisi anggota Dewan Komisaris telah memenuhi ketentuan Peraturan OJK Nomor 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum yang mengatur bahwa Komisaris Independen wajib paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris. Seluruh Anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen saling berkontribusi dalam diskusi yang jujur, objektif, aktif dan konstruktif pada rapat Dewan Komisaris.

Kriteria Penentuan Komisaris Independen

Kriteria Komisaris Independen mengacu pada ketentuan Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 tanggal 08 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Adapun kriteria Komisaris Independen adalah sebagai berikut:

Kriteria Komisaris Independen	Komisaris Independen			
	Chandra M. Hamzah	Iqbal Latanro	Armand B. Arief	Sentot A. Sentausa
Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Emiten atau Perusahaan Publik pada periode berikutnya.	√	√	√	√
Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.	√	√	√	√
Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Emiten atau Perusahaan Publik tersebut	√	√	√	√
Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik tersebut	√	√	√	√

Pernyataan Komisaris Independen

Komisaris Independen Perseroan telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Independensi dan telah disampaikan kepada OJK, dengan masing-masing pernyataan sebagai berikut:

1. Tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan, dan/atau hubungan keluarga dengan Bank, yang dapat memengaruhi kemampuan Komisaris Independen untuk bertindak independen sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;

2. Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa Komisaris Independen memiliki hubungan sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka Komisaris Independen bersedia melepaskan jabatan dan bersedia untuk diganti.

Di samping membuat pernyataan independensi, anggota Dewan Komisaris juga berkewajiban untuk melapor apabila terjadi perubahan status yang memengaruhi independensinya serta memastikan praktik ini telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip GCG.

Secara terinci, surat pernyataan independensi yang dimaksud sebagaimana yang tercantum di bawah ini.

SURAT PERNYATAAN INDEPENDEN
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Chandra M. Hamzah
Tempat/tanggal lahir : Jakarta, 25 Februari 1967
Alamat domisili (Sisa kopi KTP / SDM terlampir) : Jl. Hengkyo Kencana No. 40-41-42
Nomor telepon rumah : 021-5511-1000
Jabatan : Komisaris Independen
Nama perusahaan : PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Nomor telepon perusahaan : 021-5511-1000

Dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. Tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain, dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan saya untuk bertindak independen sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
2. Apabila kemudian hari ditemukan bahwa saya memiliki hubungan sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka saya bersedia melepaskan jabatan Komisaris Independen saya dan bersedia untuk diganti.

Demikian pernyataan independensi saya, yang telah saya buat dengan sebenar-benarnya.
Jakarta, 5 Februari 2020

Mengetahui :

Nison L.P. Nugitaputra
Direktur PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk


Chandra M. Hamzah

BUMN 

SURAT PERNYATAAN INDEPENDEN
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Iqbal Latano
Tempat dan Tanggal Lahir : Ujung Pandang, 5 Oktober 1958
Alamat domisili (Sisa kopi KTP/GM terlampir) : Jl. Hengkyo Kencana No. 40-41-42
Nomor telepon rumah : 021-5511-1000
Jabatan : Calon Wakil Komisaris Utama Independen
Nama perusahaan : PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Nomor telepon perusahaan : 021-5511-1000

Dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. Tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain, dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan saya untuk bertindak independen sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
2. Apabila kemudian hari ditemukan bahwa saya memiliki hubungan sebagaimana dimaksud pada angka 1, maka saya bersedia melepaskan jabatan Komisaris Independen saya dan bersedia untuk diganti.

Demikian pernyataan independensi saya, yang telah saya buat dengan sebenar-benarnya.
Jakarta 27 April 2021

Mengetahui :

And Niswanto
Direktur Operasional, IT and Digital Banking
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk


Iqbal Latano

SURAT PERNYATAAN INDEPENDEN
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Armand Bachtiar Arief

Tempat/tanggal lahir : Tanjung Enim, 28 April 1952

Alamat domisili (foto kopi KTP / SIM terlampir) : Komplek Dharma Jaya, Jl. Dharma No. 11, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor telepon rumah : 0271-700000

Jabatan : Komisaris Independen

Nama perusahaan : PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Nomor telepon perusahaan : 021-55111111

Dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. Tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain, dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan saya untuk bertindak independen sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
2. Apabila kemudian hari ditemukan bahwa saya memiliki hubungan sebagaimana dimaksud pada angka 1 maka saya bersedia melepaskan jabatan Komisaris Independen saya dan bersedia untuk diganti.

Demikian pernyataan independensi saya, yang telah saya buat dengan sebenar-benarnya.

Jakarta, 30 Januari 2020

Mengetahui :
Nison L.P. Supitopila
Direktur PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Armand Bachtiar Arief

SURAT PERNYATAAN
Bank **BTN**
Sahabat Keuangan Indonesia

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sentot A. Sentausa

Tempat dan Tanggal Lahir : Jakarta, 10 Juni 1957

Alamat domisili (foto kopi KTP/SIM terlampir) : Jl. Jendral A. Yani No. 30, RT 001, Desa Mekar Sari, Kecamatan Mekar Sari, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17103

Nomor telepon rumah : +

Jabatan : Komisaris Independen

Nama perusahaan : PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Nomor telepon perusahaan : 021-55111111

Dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. Tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain, dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan saya untuk bertindak independen sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
2. Apabila kemudian hari ditemukan bahwa saya memiliki hubungan sebagaimana dimaksud pada angka 1 maka saya bersedia melepaskan jabatan Komisaris Independen saya dan bersedia untuk diganti.

Demikian pernyataan independensi saya, yang telah saya buat dengan sebenar-benarnya.

Jakarta, 13 April 2022

Mengetahui :
CHANGRA W. HAMZAH
Komisaris Utama/Independen
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

SENTOT A. SENTAUSA

Rapat Dewan Komisaris

Kebijakan Rapat

JENIS RAPAT

1. Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan yang selanjutnya disebut dengan rapat Dewan Komisaris.
2. Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan yang selanjutnya disebut dengan rapat Dewan Komisaris bersama Direksi.
3. Dewan Komisaris dapat mengadakan rapat sewaktu-waktu atas permintaan 1 (satu) atau beberapa anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi, dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.

PEMANGGILAN DAN PENYELENGGARAAN RAPAT

1. Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi diselenggarakan jika dihadiri mayoritas anggota Dewan Komisaris.
2. Pelaksanaan rapat Dewan Komisaris wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
3. Komisaris yang tidak dapat menghadiri rapat secara fisik, dapat menghadiri rapat Dewan Komisaris melalui tatap muka dengan memanfaatkan teknologi informasi.

4. Pemanggilan rapat harus dilakukan oleh Komisaris Utama dan dalam hal Komisaris Utama berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak mana pun, pemanggilan rapat dilakukan oleh Wakil Komisaris Utama.
5. Dalam hal Wakil Komisaris Utama berhalangan karena sebab apa pun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak mana pun, maka pemanggilan rapat dilakukan oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris.
6. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan atau diserahkan langsung kepada setiap anggota Dewan Komisaris dengan tanda terima yang memadai, atau dengan pos tercatat, atau dengan jasa kurir atau dengan telex, faksimile, atau surat elektronik (surel) paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat, atau dalam waktu yang lebih singkat jika dalam keadaan mendesak.
7. Pemanggilan rapat tidak diperlukan untuk rapat-rapat yang telah dijadwalkan berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris yang diadakan sebelumnya.
8. Pemanggilan rapat harus mencantumkan acara, tanggal, waktu, dan tempat rapat.
9. Rapat diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat lain di dalam wilayah Republik Indonesia atau di tempat kegiatan usaha Perseroan.
10. Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri dan atau diwakili oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota Dewan Komisaris.

11. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib menghadiri paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah Rapat Dewan Komisaris yang diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun buku.
12. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib menghadiri paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi yang diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun buku.

MATERI RAPAT

1. Materi rapat didistribusikan kepada seluruh peserta rapat paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum rapat diselenggarakan.
2. Dalam hal rapat diselenggarakan di luar jadwal dengan alasan mendesak dan sangat penting, materi rapat dapat disampaikan sebelum rapat diselenggarakan.

PIMPINAN RAPAT

1. Rapat dipimpin oleh Komisaris Utama.
2. Dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, maka Wakil Komisaris Utama yang memimpin rapat, atau anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama yang memimpin rapat apabila pada saat yang bersamaan Wakil Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, atau anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Wakil Komisaris Utama yang memimpin rapat apabila pada saat yang bersamaan Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan dan tidak melakukan penunjukan.
3. Apabila Komisaris Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apa pun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga dan tidak ada Wakil Komisaris Utama, maka rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang hadir dan dipilih dalam rapat tersebut.
4. Dalam hal Komisaris Utama tidak melakukan penunjukan, maka anggota Dewan Komisaris yang paling lama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris bertindak sebagai pimpinan rapat.
5. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang paling lama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris lebih dari satu orang, maka anggota Dewan Komisaris yang tertua dalam usia bertindak sebagai pimpinan rapat.
6. Apabila RUPS tidak mengangkat Wakil Komisaris Utama, maka dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh Komisaris Utama.

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

1. Dewan Komisaris merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.
2. Segala keputusan Dewan Komisaris diambil dalam rapat.
3. Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris wajib terlebih dahulu dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
4. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan harus diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih

dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat yang bersangkutan.

5. Setiap anggota Dewan Komisaris berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya sah dalam rapat tersebut.
6. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) usulan, maka dilakukan pemilihan ulang sehingga salah 1 (satu) usulan memperoleh suara lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.
7. Suara blangko dianggap menyetujui usul yang diajukan dalam rapat.
8. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
9. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali pimpinan rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.
10. Apabila terdapat hal-hal mendesak dan sangat penting untuk Perseroan, maka Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
11. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.
12. Segala keputusan Dewan Komisaris bersifat mengikat bagi seluruh anggota Dewan Komisaris.
13. Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi dengan cara apa pun, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak, atau kontrak yang diusulkan dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya, harus dinyatakan sifat kepentingannya dalam suatu Rapat Dewan Komisaris dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan keputusan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut.

DOKUMENTASI RAPAT

1. Dokumentasi penyelenggaraan rapat wajib dituangkan dalam Risalah Rapat.
2. Dewan Komisaris wajib membuat risalah rapat sebagaimana dimaksud pada dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Risalah Rapat Dewan Komisaris harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat yang ditunjuk oleh pimpinan rapat serta kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.
4. Risalah Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat yang ditunjuk oleh pimpinan rapat serta kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang hadir

dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.

5. Perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat.
6. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi yang tidak menandatangani hasil rapat, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.
7. Risalah rapat wajib didokumentasikan oleh Perseroan.
8. Risalah rapat merupakan bukti yang sah untuk para anggota Dewan Komisaris dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam rapat yang bersangkutan.

Rapat Internal Dewan Komisaris

RENCANA RAPAT INTERNAL DEWAN KOMISARIS

Berdasarkan Program Kerja Dewan Komisaris tahun 2023, rencana rapat Dewan Komisaris dilakukan sebanyak 36 (tiga puluh enam) kali dalam 1 (satu) tahun atau 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) bulan dari persyaratan penyelenggaraan minimal di Peraturan OJK sebanyak 1 (satu) kali dalam 2 (dua)

bulan. Pelaksanaan rapat Dewan Komisaris pada umumnya diselenggarakan pada hari Rabu atau sesuai kebutuhan.

Dewan Komisaris juga melakukan Rapat bersama Komite Organ Pendukung Dewan Komisaris yang secara garis besar akan membahas agenda sebagai berikut:

- Isu Terkini.
- Reviu/kajian terhadap laporan/surat masuk dan perkembangan tindak lanjut nasihat/arahan kepada Direksi sebelumnya.
- Paparan Komite Organ Pendukung Dewan Komisaris berupa usulan, pendapat/rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai reviu/kajian yang telah dilakukan untuk selanjutnya dapat menjadi masukan bagi Dewan Komisaris dalam memberikan arahan dan nasihat kepada Direksi sebagai bentuk pengawasan aktif Dewan Komisaris.
- Paparan Komite Audit atas Kajian Temuan Hasil Audit Internal dan/atau Eksternal Bank dan *performance review* kinerja keuangan.

REALISASI RAPAT INTERNAL DEWAN KOMISARIS

Sepanjang tahun 2023 Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat internal sebanyak 52 (lima puluh dua) kali. Secara terperinci disampaikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel Rapat Internal Dewan Komisaris

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Kehadiran Dewan Komisaris								
			Chandra M. Hamzah	Iqbal Latanro	Ahdi Jumhari Luddin	Armand B. Arief	Sentot A. Sentausa	Andin Hadiyanto	Herry Trisaputra Zuna	Himawan Arief Sugoto	Mohamad Yusuf Permana**
1.	04 Januari 2023	Agenda Rapat Berkala: – Evaluasi Hasil Rapat – Surat Masuk – Informasi Terkini – Informasi Lain	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	-
2.	11 Januari 2023	Agenda Rapat Berkala: – Evaluasi Hasil Rapat – Surat Masuk – Informasi Terkini – Informasi Lain	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	-
3.	18 Januari 2023	Agenda Rapat Berkala: – Evaluasi Hasil Rapat – Surat Masuk – Informasi Terkini – Informasi Lain	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir sebagai pengamat
4.	25 Januari 2023	Agenda Rapat Berkala: – Evaluasi Hasil Rapat – Surat Masuk – Informasi Terkini – Informasi Lain	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir sebagai pengamat

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Kehadiran Dewan Komisaris								
			Chandra M. Hamzah	Iqbal Latanro	Ahdi Jumbuhri Luddin	Armand B. Arief	Sentot A. Sentausa	Andin Hadiyanto	Herry Trisaputra Zuna	Himawan Arief Sugoto	Mohamad Yusuf Permana**
5.	30 Januari 2023	– Pembahasan Uji Tuntas (<i>Due Dilligence</i>) Dana Pensiun BTN	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Izin berhalangan hadir sebagai pengamat
6.	01 Februari 2023	Agenda Rapat Berkala: – Evaluasi Hasil Rapat – Surat Masuk – Informasi Terkini – Informasi Lain	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir sebagai pengamat
7.	08 Februari 2023	Agenda Rapat Berkala: – Evaluasi Hasil Rapat – Surat Masuk – Informasi Terkini – Informasi Lain	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir sebagai pengamat
8.	10 Februari 2023	Closing Meeting Laporan Keuangan Tahun 2022 dengan Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja (<i>a member firm of Ernst & Young Global Limited</i>)	Izin	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir sebagai pengamat
9.	13 Februari 2023	Tindak Lanjut Closing Meeting Laporan Keuangan Tahun 2022 dengan Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja (<i>a member firm of Ernst & Young Global Limited</i>)	Izin	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir sebagai pengamat
10.	15 Februari 2023	Agenda Rapat Berkala: – Evaluasi Hasil Rapat – Surat Masuk – Informasi Terkini – Informasi Lain	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir sebagai pengamat
11.	22 Februari 2023	Agenda Rapat Berkala: – Evaluasi Hasil Rapat – Surat Masuk – Informasi Terkini – Informasi Lain	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir sebagai pengamat
12.	01 Maret 2023	Agenda Rapat Berkala: – Evaluasi Hasil Rapat – Surat Masuk – Informasi Terkini – Informasi Lain	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir sebagai pengamat
13.	08 Maret 2023	Agenda Rapat Berkala: – Evaluasi Hasil Rapat – Surat Masuk – Informasi Terkini – Informasi Lain	Hadir	Hadir	Sakit	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir sebagai pengamat
14.	15 Maret 2023	Agenda Rapat Berkala: – Evaluasi Hasil Rapat – Surat Masuk – Informasi Terkini – Informasi Lain	Hadir	Hadir	Sakit	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir sebagai pengamat

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Kehadiran Dewan Komisaris								
			Chandra M. Hamzah	Iqbal Latanro	Ahdi Jumhari Luddin	Armand B. Arief	Sentot A. Sentaosa	Andin Hadiyanto	Herry Trisaputra Zuna	Himawan Arief Sugoto	Mohamad Yusuf Permana**
15.	21 Maret 2023	Agenda Rapat Berkala: – Evaluasi Hasil Rapat – Surat Masuk – Informasi Terkini – Informasi Lain	Hadir	Hadir	Sakit	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir sebagai pengamat
16.	29 Maret 2023	Agenda Rapat Berkala: – Evaluasi Hasil Rapat – Surat Masuk – Informasi Terkini – Informasi Lain	Hadir	Hadir	Sakit	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir sebagai pengamat
17.	05 April 2023	Agenda Rapat Berkala: – Evaluasi Hasil Rapat – Surat Masuk – Informasi Terkini – Informasi Lain	Hadir	Hadir	Sakit	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir sebagai pengamat
18.	12 April 2023	Agenda Rapat Berkala: – Evaluasi Hasil Rapat – Surat Masuk – Informasi Terkini – Informasi Lain	Hadir	Hadir	Sakit	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir sebagai pengamat
19.	03 Mei 2023	Agenda Rapat Berkala: – Evaluasi Hasil Rapat – Surat Masuk – Informasi Terkini – Informasi Lain	Hadir	Hadir	Sakit	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir sebagai pengamat
20.	10 Mei 2023	Agenda Rapat Berkala: – Evaluasi Hasil Rapat – Surat Masuk – Informasi Terkini – Informasi Lain	Hadir	Hadir	Sakit	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir sebagai pengamat
21.	17 Mei 2023	Agenda Rapat Berkala: – Evaluasi Hasil Rapat – Surat Masuk – Informasi Terkini – Informasi Lain	Hadir	Hadir	Sakit	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir sebagai pengamat
22.	24 Mei 2023	Agenda Rapat Berkala: – Evaluasi Hasil Rapat – Surat Masuk – Informasi Terkini – Informasi Lain	Hadir	Hadir	Sakit	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir sebagai pengamat
23.	31 Mei 2023	Agenda Rapat Berkala: – Evaluasi Hasil Rapat – Surat Masuk – Informasi Terkini – Informasi Lain	Hadir	Hadir	Sakit	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir sebagai pengamat
24.	07 Juni 2023	Agenda Rapat Berkala: – Evaluasi Hasil Rapat – Surat Masuk – Informasi Terkini – Informasi Lain	Hadir	Hadir	Sakit	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Kehadiran Dewan Komisaris								
			Chandra M. Hamzah	Iqbal Latanro	Ahdi Jumhari Luddin	Armand B. Arief	Sentot A. Sentausa	Andin Hadiyanto	Herry Trisaputra Zuna	Himawan Arief Sugoto	Mohamad Yusuf Permana**
25.	14 Juni 2023	Agenda Rapat Berkala: – Evaluasi Hasil Rapat – Surat Masuk – Informasi Terkini – Informasi Lain	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir
26.	21 Juni 2023	Agenda Rapat Berkala: – Evaluasi Hasil Rapat – Surat Masuk – Informasi Terkini – Informasi Lain	Hadir	Hadir	Sakit	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir
27.	27 Juni 2023	Agenda Rapat Berkala: – Evaluasi Hasil Rapat – Surat Masuk – Informasi Terkini – Informasi Lain	Hadir	Hadir	Sakit	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir
28.	05 Juli 2023	Agenda Rapat Berkala: – Evaluasi Hasil Rapat – Surat Masuk – Informasi Terkini – Informasi Lain	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir
29.	12 Juli 2023	Agenda Rapat Berkala: – Evaluasi Hasil Rapat – Surat Masuk – Informasi Terkini – Informasi Lain	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir
30.	18 Juli 2023	Agenda Rapat Berkala: – Evaluasi Hasil Rapat – Surat Masuk – Informasi Terkini – Informasi Lain	Izin	Hadir	Sakit	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir
31.	26 Juli 2023	Agenda Rapat Berkala: – Evaluasi Hasil Rapat – Surat Masuk – Informasi Terkini – Informasi Lain	Hadir	Hadir	Sakit	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir
32.	02 Agustus 2023	Agenda Rapat Berkala: – Evaluasi Hasil Rapat – Surat Masuk – Informasi Terkini – Informasi Lain	Hadir	Hadir	Sakit	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir
33.	09 Agustus 2023	Agenda Rapat Berkala: – Evaluasi Hasil Rapat – Surat Masuk – Informasi Terkini – Informasi Lain	Izin	Hadir	Sakit	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir
34.	16 Agustus 2023	Agenda Rapat Berkala: – Pembahasan Progress Rencana Pemisahan Unit Usaha Syariah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Hadir	Hadir	-	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Kehadiran Dewan Komisaris								
			Chandra M. Hamzah	Iqbal Latanro	Ahdi Jumhari Luddin	Armand B. Arief	Sentot A. Sentausa	Andin Hadiyanto	Herry Trisaputra Zuna	Himawan Arief Sugoto	Mohamad Yusuf Permana**
35.	23 Agustus 2023	Agenda Rapat Berkala: - Evaluasi Hasil Rapat - Surat Masuk - Informasi Terkini - Informasi Lain	Hadir	Hadir	-	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir
36.	30 Agustus 2023	Agenda Rapat Berkala: - Evaluasi Hasil Rapat - Surat Masuk - Informasi Terkini - Informasi Lain	Hadir	Hadir	-	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir
37.	06 September 2023	Agenda Rapat Berkala: - Evaluasi Hasil Rapat - Surat Masuk - Informasi Terkini - Informasi Lain	Hadir	Hadir	-	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir
38.	13 September 2023	Agenda Rapat Berkala: - Evaluasi Hasil Rapat - Surat Masuk - Informasi Terkini - Informasi Lain	Hadir	Hadir	-	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir
39.	20 September 2023	Agenda Rapat Berkala: - Evaluasi Hasil Rapat - Surat Masuk - Informasi Terkini - Informasi Lain	Izin	Hadir	-	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir
40.	27 September 2023	Agenda Rapat Berkala: - Evaluasi Hasil Rapat - Surat Masuk - Informasi Terkini - Informasi Lain	Izin	Hadir	-	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir
41.	04 Oktober 2023	Agenda Rapat Berkala: - Evaluasi Hasil Rapat - Surat Masuk - Informasi Terkini - Informasi Lain	Izin	Hadir	-	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir
42.	11 Oktober 2023	Agenda Rapat Berkala: - Evaluasi Hasil Rapat - Surat Masuk - Informasi Terkini - Informasi Lain	Hadir	Hadir	-	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir
43.	18 Oktober 2023	Agenda Rapat Berkala: - Evaluasi Hasil Rapat - Surat Masuk - Informasi Terkini - Informasi Lain	Hadir	Hadir	-	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir
44.	01 November 2023	Agenda Rapat Berkala: - Evaluasi Hasil Rapat - Surat Masuk - Informasi Terkini - Informasi Lain	Hadir	Hadir	-	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir
45.	08 November 2023	Agenda Rapat Berkala: - Evaluasi Hasil Rapat - Surat Masuk - Informasi Terkini - Informasi Lain	Hadir	Hadir	-	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Kehadiran Dewan Komisaris								
			Chandra M. Hamzah	Iqbal Latanro	Ahdi Jumhari Luddin	Armand B. Arief	Sentot A. Sentausa	Andin Hadiyanto	Herry Trisaputra Zuna	Himawan Arief Sugoto	Mohamad Yusuf Permana**
46.	15 November 2023	Agenda Rapat Berkala: - Evaluasi Hasil Rapat - Surat Masuk - Informasi Terkini - Informasi Lain	Hadir	Hadir	-	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir
47.	22 November 2023	Agenda Rapat Berkala: - Evaluasi Hasil Rapat - Surat Masuk - Informasi Terkini - Informasi Lain	Hadir	Hadir	-	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir
48.	27 November 2023	Closing Meeting Limited Review Laporan Keuangan per 30 September 2023 oleh KAP PSS-EY dan Pembahasan Draft Laporan Keuangan Publikasi per 30 September 2023	Hadir	Hadir	-	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir
49.	29 November 2023	Agenda Rapat Berkala: - Evaluasi Hasil Rapat - Surat Masuk - Informasi Terkini - Informasi Lain	Hadir	Hadir	-	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir
50.	06 Desember 2023	Agenda Rapat Berkala: - Evaluasi Hasil Rapat - Surat Masuk - Informasi Terkini - Informasi Lain	Hadir	Hadir	-	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir
51.	13 Desember 2023	Agenda Rapat Berkala: - Evaluasi Hasil Rapat - Surat Masuk - Informasi Terkini - Informasi Lain	Hadir	Hadir	-	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir
52.	20 Desember 2023	Agenda Rapat Berkala: - Evaluasi Hasil Rapat - Surat Masuk - Informasi Terkini - Informasi Lain	Izin	Hadir	-	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir	Hadir

Rapat Dewan Komisaris Bersama Direksi

Rencana Rapat Dewan Komisaris Bersama Direksi

Berdasarkan Kesepakatan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi, Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi dilaksanakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. Adapun agenda yang dibahas sekurang-kurangnya meliputi:

1. Penyusunan Rencana Bisnis Bank (RBB) dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP).
2. Reviu Kinerja Perseroan secara berkala.
3. Penerapan Program APU, PPT, dan PPPSPM.
4. Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan dan Tindak Lanjut temuan Audit Internal maupun Eksternal.

Pada tahun 2023, disepakati bahwa rapat bersama dijadwalkan pada hari Rabu di minggu ketiga tiap bulannya. Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi pada bulan ganjil yang diinisiasi oleh Dewan Komisaris, sedangkan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris pada bulan genap yang diinisiasi oleh Direksi. Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi dan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris sesuai dengan Anggaran Dasar.

Realisasi Rapat Dewan Komisaris Bersama Direksi

Sepanjang tahun 2023 Dewan Komisaris telah melaksanakan Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi yang diinisiasi oleh Dewan Komisaris sebanyak 6 (enam) kali. Secara terperinci, berikut tabel Rapat Bersama Dewan Komisaris Dengan Direksi.

Tabel Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Dewan Komisaris		Direksi	
			Peserta Rapat	Kehadiran	Peserta Rapat	Kehadiran
1	18 Januari 2023	1. <i>Performance Review Bankwide dan Unit Usaha Syariah (UUS) s.d. Desember 2022;</i>	Chandra M. Hamzah	Hadir	Haru Koesmahargyo	Hadir
			Iqbal Latanro	Hadir	Nixon L.P. Napitupulu	Hadir
		2. <i>Progres Initiative Corporate Plan s.d. Desember 2022;</i>	Ahdi Jumhari Luddin	Hadir	Hirwandi Gafar	Berhalangan hadir
			Armand B. Arief	Hadir	Nofry Rony Poetra	Hadir
		3. <i>Monitoring Risk Appetite, Risk Tolerance, dan Recovery Plan Bankwide dan Unit Usaha Syariah (UUS) s.d. Bulan Desember 2022;</i>	Sentot A. Sentausa	Hadir	Eko Waluyo	Hadir
			Andin Hadiyanto	Hadir	Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
		4. <i>Monitoring Progres Penyelesaian Dokumen Kredit s.d. Desember 2022;</i>	Herry Trisaputra Zuna	Hadir	Andi Nirwoto	Hadir
			Himawan Arief Sugoto	Hadir	Jasmin	Hadir
2	21 Maret 2023	1. <i>Performance Review Bankwide dan Unit Usaha Syariah (UUS) s.d. Februari 2023;</i>	Mohamad Yusuf Permana	Hadir sebagai pengamat	Setiyo Wibowo	Hadir
			Chandra M. Hamzah	Hadir	Nixon L.P. Napitupulu	Hadir sebagai pengamat
		2. <i>Progres Initiative Corporate Plan s.d. Februari 2023;</i>	Iqbal Latanro	Hadir	Oni Febriarto Rahardjo	Hadir sebagai pengamat
			Ahdi Jumhari Luddin	Sakit	Hirwandi Gafar	Hadir
		3. <i>Monitoring Risk Appetite, Risk Tolerance, dan Recovery Plan Bankwide dan Unit Usaha Syariah (UUS) s.d. Bulan Februari 2023.</i>	Armand B. Arief	Hadir	Nofry Rony Poetra	Hadir
			Sentot A. Sentausa	Hadir	Eko Waluyo	Hadir
		4. <i>Revisi Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2023–2025 dan Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2023.</i>	Andin Hadiyanto	Hadir	Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Herry Trisaputra Zuna	Hadir	Andi Nirwoto	Hadir
3	24 Mei 2023	1. <i>Performance Review Bankwide dan Unit Usaha Syariah (UUS) s.d. April 2023;</i>	Himawan Arief Sugoto	Hadir	Jasmin	Hadir
			Mohamad Yusuf Permana	Hadir sebagai pengamat	Setiyo Wibowo	Hadir
		2. <i>Progres Initiative Corporate Plan s.d. April 2023;</i>	Chandra M. Hamzah	Hadir	Nixon L.P. Napitupulu	Hadir sebagai pengamat
			Iqbal Latanro	Hadir	Oni Febriarto Rahardjo	Hadir sebagai pengamat
		3. <i>Monitoring Risk Appetite, Risk Tolerance, dan Recovery Plan Bankwide dan Unit Usaha Syariah (UUS) s.d. Bulan April 2023;</i>	Ahdi Jumhari Luddin	Sakit	Hirwandi Gafar	Hadir
			Armand B. Arief	Hadir	Nofry Rony Poetra	Hadir
		4. <i>Revisi Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2023–2025 dan Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2023.</i>	Sentot A. Sentausa	Hadir	Eko Waluyo	Hadir
			Andin Hadiyanto	Hadir	Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
4	26 Juli 2023	1. <i>Performance Review Bankwide dan Unit Usaha Syariah (UUS) s.d. Juni 2023;</i>	Herry Trisaputra Zuna	Hadir	Andi Nirwoto	Hadir
			Himawan Arief Sugoto	Hadir	Jasmin	Hadir
		2. <i>Progres Initiative Corporate Plan s.d. Juni 2023;</i>	Mohamad Yusuf Permana	Hadir sebagai pengamat	Setiyo Wibowo	Hadir
			Chandra M. Hamzah	Hadir	Nixon L.P. Napitupulu	Hadir sebagai pengamat
		3. <i>Monitoring Risk Appetite, Risk Tolerance, dan Recovery Plan Bankwide dan Unit Usaha Syariah (UUS) s.d. Bulan Juni 2023;</i>	Iqbal Latanro	Hadir	Oni Febriarto Rahardjo	Hadir sebagai pengamat
			Ahdi Jumhari Luddin	Sakit	Hirwandi Gafar	Hadir
		4. <i>Revisi Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2023–2025 dan Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2023.</i>	Armand B. Arief	Hadir	Nofry Rony Poetra	Hadir
			Sentot A. Sentausa	Hadir	Eko Waluyo	Hadir

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Dewan Komisaris		Direksi	
			Peserta Rapat	Kehadiran	Peserta Rapat	Kehadiran
4	26 Juli 2023	1. <i>Performance Review Bankwide dan Unit Usaha Syariah (UUS) s.d. Juni 2023 disertai Prognosis Pencapaian s.d. Desember 2023;</i> 2. <i>Pencapaian Key Performance Indicators (KPI) Direksi secara Kolegial s.d. Triwulan II Tahun 2023;</i> 3. <i>Progres Initiative Corporate Plan s.d. Juni 2023;</i> 4. <i>Monitoring Risk Appetite, Risk Tolerance, dan Recovery Plan Bankwide dan Unit Usaha Syariah (UUS) s.d. Bulan Juni 2023;</i> 5. <i>Monitoring Progres Penyelesaian Dokumen Kredit s.d. Juni 2023;</i> 6. <i>Monitoring Penerapan Program APU dan PPT s.d. Juni 2023.</i>	Chandra M. Hamzah	Hadir	Nixon L.P. Napitupulu	Hadir
			Iqbal Latanro	Hadir	Oni Febriarto Rahardjo	Berhalangan hadir
			Ahdi Jumhari Luddin	Sakit	Hirwandi Gafar	Hadir
			Armand B. Arief	Hadir	Nofry Rony Poetra	Berhalangan hadir
			Sentot A. Sentausa	Hadir	Eko Waluyo	Hadir
			Andin Hadiyanto	Hadir	Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Herry Trisaputra Zuna	Hadir	Andi Nirwoto	Hadir
			Himawan Arief Sugoto	Hadir	Jasmin	Berhalangan hadir
					Setiyo Wibowo	Hadir
			Mohamad Yusuf Permana	Hadir	Hakim Putratama	Hadir
5	20 September 2023	1. <i>Revisi Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2023–2025 dan Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2023. Performance Review Bankwide s.d. Agustus 2023 disertai Prognosis Pencapaian s.d. Desember 2023;</i> 2. <i>Performance Review Unit Usaha Syariah (UUS) s.d. Agustus 2023 disertai Prognosis Pencapaian s.d. Desember 2023;</i> 3. <i>Progres Initiative Corporate Plan s.d. Agustus 2023;</i> 4. <i>Monitoring Risk Appetite, Risk Tolerance, dan Recovery Plan Bankwide dan Unit Usaha Syariah (UUS) s.d. Bulan Agustus 2023.</i>	Chandra M. Hamzah	Hadir	Nixon L.P. Napitupulu	Berhalangan hadir
			Iqbal Latanro	Hadir	Oni Febriarto Rahardjo	Hadir
			Armand B. Arief	Hadir	Hirwandi Gafar	Hadir
			Sentot A. Sentausa	Hadir	Nofry Rony Poetra	Hadir
			Andin Hadiyanto	Hadir	Eko Waluyo	Hadir
			Herry Trisaputra Zuna	Hadir	Elisabeth Novie Riswanti	Hadir
			Himawan Arief Sugoto	Hadir	Andi Nirwoto	Hadir
			Mohamad Yusuf Permana	Hadir	Jasmin	Hadir
					Setiyo Wibowo	Hadir
					Hakim Putratama	Hadir
6	22 November 2023	1. <i>Penyusunan Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2024–2026 dan Rencana Kerja & Anggaran Kerja Perusahaan Tahun 2024;</i> 2. <i>Performance Review Bankwide s.d. Oktober 2023 disertai Prognosis Pencapaian s.d. Desember 2023;</i> 3. <i>Performance Review Unit Usaha Syariah (UUS) s.d. Oktober 2023 disertai Prognosis Pencapaian s.d. Desember 2023;</i>	Chandra M. Hamzah	Hadir	Nixon L.P. Napitupulu	Hadir
			Iqbal Latanro	Hadir	Oni Febriarto Rahardjo	Hadir
			Armand B. Arief	Hadir	Hirwandi Gafar	Berhalangan hadir
			Sentot A. Sentausa	Hadir	Nofry Rony Poetra	Hadir
			Andin Hadiyanto	Hadir	Eko Waluyo	Hadir
			Herry Trisaputra Zuna	Hadir	Elisabeth Novie Riswanti	Hadir

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Dewan Komisaris		Direksi	
			Peserta Rapat	Kehadiran	Peserta Rapat	Kehadiran
		4. Progres <i>Initiative Corporate Plan</i> s.d. Oktober 2023;	Himawan Arief Sugoto	Hadir	Andi Nirwoto	Hadir
		5. <i>Monitoring Risk Appetite, Risk Tolerance</i> , dan <i>Recovery Plan Bankwide</i> dan Unit Usaha Syariah (UUS) s.d. Bulan Oktober 2023; dan	Mohamad Yusuf Permana	Hadir	Jasmin	Hadir
		6. Perkembangan Bunga Akrua (<i>Accrued Interest</i>) Kredit.			Setiyo Wibowo	Hadir
					Hakim Putratama	Hadir

Direksi bertanggung jawab untuk memastikan Dewan Komisaris mendapatkan akses informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu. Dewan Komisaris memastikan memperoleh informasi yang memadai. Direksi menyediakan informasi kepada Dewan Komisaris secara teratur, tanpa penundaan dan secara komprehensif tentang semua masalah yang relevan dengan Perseroan. Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat meminta Direksi untuk memberikan informasi tambahan.

Frekuensi dan Kehadiran Rapat

Tabel Frekuensi dan Kehadiran Rapat Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Rapat Internal Dewan Komisaris			Rapat Dewan Komisaris Bersama Direksi			RUPS		
		Jumlah dan Persentase Kehadiran			Jumlah dan Persentase Kehadiran			Jumlah dan Persentase Kehadiran		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase
Chandra M. Hamzah	Komisaris Utama/ Independen	52	44	84,62%	6	6	100%	2	2	100%
Iqbal Latanro	Wakil Komisaris Utama/ Independen	52	52	100%	6	6	100%	2	2	100%
Ahdi Jumhari Luddin*	Komisaris Independen	15	15	100%	1	1	100%	2	2	100%
Armand B. Arief	Komisaris Independen	52	52	100%	6	6	100%	2	2	100%
Sentot A. Sentausa	Komisaris Independen	52	52	100%	6	6	100%	2	2	100%
Andin Hadiyanto	Komisaris	52	52	100%	6	6	100%	2	2	100%
Herry Trisaputra Zuna	Komisaris	52	52	100%	6	6	100%	2	2	100%
Himawan Arief Sugoto	Komisaris	52	52	100%	6	6	100%	2	2	100%
Mohamad Yusuf Permana**	Komisaris	29	29	100%	3	3	100%	1	1	100%

* Kehadiran Bpk. Ahdi Jumhari Luddin sebagai Komisaris Independen dalam rapat adalah dikarenakan kondisi kesehatan hingga Ybs. meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2023.

** Diangkat berdasarkan RUPSLB tanggal 11 Januari 2023 dan efektif sejak 07 Juni 2023.

Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Anggota Dewan Komisaris

Kebijakan terkait pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Dewan Komisaris telah diatur dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*). Program pendalaman pengetahuan bagi anggota Dewan Komisaris meliputi:

1. Program pendalaman pengetahuan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja Dewan Komisaris.
2. Setiap anggota Dewan Komisaris yang mengikuti program pendalaman pengetahuan seperti seminar, dan/atau pelatihan diwajibkan untuk menyajikan presentasi kepada anggota lainnya dalam berbagi informasi dan pengetahuan.

3. Materi yang diterima dari program pendalaman pengetahuan harus didokumentasikan dengan baik dalam suatu bagian tersendiri. Tanggung jawab dokumentasi pada Sekretaris Dewan Komisaris. Materi tersebut harus tersedia jika suatu saat diperlukan.

Sepanjang tahun 2023, anggota Dewan Komisaris Perseroan telah mengikuti berbagai program peningkatan kompetensi berupa pelatihan, lokakarya, konferensi maupun seminar sebagaimana tabel berikut ini.

Nama	Jabatan	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
Chandra M. Hamzah	Komisaris Utama/ Independen	<i>Leadership Forum "Envisioning Culture For Leader"</i>	12 - 13 Mei 2023 di Padma Hotel Semarang	PwC dan Korn Ferry
		GRC Masterclass Program 2023 "Sosialisasi Peningkatan BUMN & Anak Perusahaan BUMN"	14 September 2023 melalui Zoom Meeting	BSE BUMN
		<i>Board of Commissioner Forum 2023</i>	15 - 16 September 2023 di Ayana Hotel Waecicu Beach, Labuan Bajo, NTT	LPPI
		GRC Masterclass Program 2023 "ESG for Boards – Governance of ESG"	27 September 2023 melalui Zoom Meeting	BSE BUMN
		GRC Masterclass Program 2023 "Integrated Information For Supervisory Board"	05 Oktober 2023 melalui Zoom Meeting	BSE BUMN
		GRC Masterclass Program 2023 "Methodology and Environmental and Social Management Systems"	25 Oktober 2023 melalui Zoom Meeting	BSE BUMN
		<i>Executive Risk Management Refresher Program, LPPI - Europe 2023</i>	29 Oktober 2023 di Amsterdam, Brussel, & Paris	LPPI
Iqbal Latanro	Wakil Komisaris Utama/ Independen	<i>Leadership Forum "Envisioning Culture For Leader"</i>	12 -13 Mei 2023 di Padma Hotel Semarang	PwC dan Korn Ferry
		GRC Masterclass Program 2023 "Pre IPO dan Post IPO - Peningkatan dan penerbitan efek bersifat utang & sukuk (EBUS) "	10 Agustus 2023 melalui Zoom Meeting	OJK
		GRC Masterclass Program 2023 "Sosialisasi Peningkatan BUMN & Anak Perusahaan BUMN"	14 September 2023 melalui Zoom Meeting	BSE BUMN
		<i>Board of Commissioner Forum 2023</i>	15 - 16 September 2023 di Ayana Hotel Waecicu Beach, Labuan Bajo, NTT	LPPI
		GRC Masterclass Program 2023 "ESG for Boards – Governance of ESG"	27 September 2023 melalui Zoom Meeting	BSE BUMN
		GRC Masterclass Program 2023 "Integrated Information For Supervisory Board"	05 Oktober 2023 melalui Zoom Meeting	BSE BUMN
		GRC Masterclass Program 2023 "Methodology and Environmental and Social Management Systems"	25 Oktober 2023 melalui Zoom Meeting	BSE BUMN
		<i>Executive Risk Management Refresher Program, LPPI - Europe 2023</i>	29 Oktober 2023 di Amsterdam, Brussel, & Paris	LPPI
Ahdi Jumhari Luddin*	Komisaris Independen	GRC Masterclass Program 2023: Audit Teknologi Informasi	27 Juni 2023 melalui Zoom Meeting	BSE BUMN
Armand B. Arief	Komisaris Independen	<i>Leadership Forum "Envisioning Culture For Leader"</i>	12 - 13 Mei 2023 di Padma Hotel Semarang	PwC dan Korn Ferry
		GRC Masterclass Program 2023 "Risk Management Effectiveness Evaluation"	07 September 2023 melalui Zoom Meeting	BSE BUMN
		GRC Masterclass Program 2023 "Sosialisasi Peningkatan BUMN & Anak Perusahaan BUMN"	14 September 2023 melalui Zoom Meeting	BSE BUMN
		<i>Board of Commissioner Forum 2023</i>	15 - 16 September 2023 di Ayana Hotel Waecicu Beach, Labuan Bajo, NTT	LPPI
		GRC Masterclass Program 2023 "ESG for Boards – Governance of ESG"	27 September 2023 melalui Zoom Meeting	BSE BUMN
		GRC Masterclass Program 2023 "Integrated Information For Supervisory Board"	05 Oktober 2023 melalui Zoom Meeting	BSE BUMN
Sentot A. Sentausa	Komisaris Independen	<i>Leadership Forum "Envisioning Culture For Leader"</i>	12 - 13 Mei 2023 di Padma Hotel Semarang	PwC dan Korn Ferry
		GRC Masterclass Program 2023 "Sosialisasi Peningkatan BUMN & Anak Perusahaan BUMN"	14 September 2023 melalui Zoom Meeting	BSE BUMN
		<i>Board of Commissioner Forum 2023</i>	15 - 16 September 2023 di Ayana Hotel Waecicu Beach, Labuan Bajo, NTT	LPPI

Nama	Jabatan	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
		GRC Masterclass Program 2023 "ESG for Boards – Governance of ESG"	27 September 2023 melalui Zoom Meeting	BSE BUMN
		GRC Masterclass Program 2023 "Integrated Information For Supervisory Board"	05 Oktober 2023 melalui Zoom Meeting	BSE BUMN
		GRC Masterclass Program 2023 "Methodology and Environmental and Social Management Systems"	25 Oktober 2023 melalui Zoom Meeting	BSE BUMN
Andin Hadiyanto	Komisaris	Leadership Forum "Envisioning Culture For Leader"	12 - 13 Mei 2023 di Padma Hotel Semarang	PwC dan Korn Ferry
		GRC Masterclass Program 2023 "Sosialisasi Peningkatan BUMN & Anak Perusahaan BUMN"	14 September 2023 melalui Zoom Meeting	BSE BUMN
		Board of Commissioner Forum 2023	15 - 16 September 2023 di Ayana Hotel Waecicu Beach, Labuan Bajo, NTT	LPPI
		GRC Masterclass Program 2023 "ESG for Boards – Governance of ESG"	27 September 2023 melalui Zoom Meeting	BSE BUMN
		GRC Masterclass Program 2023 "Integrated Information For Supervisory Board"	05 Oktober 2023 melalui Zoom Meeting	BSE BUMN
		GRC Masterclass Program 2023 "Methodology and Environmental and Social Management Systems"	25 Oktober 2023 melalui Zoom Meeting	BSE BUMN
Herry Trisaputra Zuna	Komisaris	GRC Masterclass Program 2023 "Risk Management Effectiveness Evaluation"	07 September 2023 melalui Zoom Meeting	BSE BUMN
		GRC Masterclass Program 2023 "Sosialisasi Peningkatan BUMN & Anak Perusahaan BUMN"	14 September 2023 melalui Zoom Meeting	BSE BUMN
		Board of Commissioner Forum 2023	15 - 16 September 2023 di Ayana Hotel Waecicu Beach, Labuan Bajo, NTT	LPPI
		GRC Masterclass Program 2023 "ESG for Boards – Governance of ESG"	27 September 2023 melalui Zoom Meeting	BSE BUMN
		GRC Masterclass Program 2023 "Integrated Information For Supervisory Board"	05 Oktober 2023 melalui Zoom Meeting	BSE BUMN
		Webinar OJK "Managing Environmental, Social and Governance Risk and Opportunities"	19 Oktober 2023 melalui Zoom Meeting	OJK
Himawan Arief Sugotot	Komisaris	GRC Masterclass Program 2023 "Methodology and Environmental and Social Management Systems"	25 Oktober 2023 melalui Zoom Meeting	BSE BUMN
		Leadership Forum "Envisioning Culture For Leader"	12 - 13 Mei 2023 di Padma Hotel Semarang	PwC dan Korn Ferry
		GRC Masterclass Program 2023 "Risk Management Effectiveness Evaluation"	07 September 2023 melalui Zoom Meeting	BSE BUMN
		GRC Masterclass Program 2023 "Sosialisasi Peningkatan BUMN & Anak Perusahaan BUMN"	14 September 2023 melalui Zoom Meeting	BSE BUMN
		Board of Commissioner Forum 2023	15 - 16 September 2023 di Ayana Hotel Waecicu Beach, Labuan Bajo, NTT	LPPI
		GRC Masterclass Program 2023 "ESG for Boards – Governance of ESG"	27 September 2023 melalui Zoom Meeting	BSE BUMN
		GRC Masterclass Program 2023 "Integrated Information For Supervisory Board"	05 Oktober 2023 melalui Zoom Meeting	BSE BUMN
		GRC Masterclass Program 2023 "Methodology and Environmental and Social Management Systems"	25 Oktober 2023 melalui Zoom Meeting	BSE BUMN
Mohamad Yusuf Permana**	Komisaris	Executive Risk Management Refresher Program, LPPI - Europe 2023	29 Oktober 2023 di Amsterdam, Brussel, & Paris	LPPI
		Pelatihan Bank Management Executive Overview for BOC	10 Agustus 2023 di LPPI Jakarta	LPPI
		GRC Masterclass Program 2023 "Sosialisasi Peningkatan BUMN & Anak Perusahaan BUMN"	14 September 2023 melalui Zoom Meeting	BSE BUMN
		GRC Masterclass Program 2023 "ESG for Boards – Governance of ESG"	27 September 2023 melalui Zoom Meeting	BSE BUMN
		GRC Masterclass Program 2023 "Integrated Information For Supervisory Board"	05 Oktober 2023 melalui Zoom Meeting	BSE BUMN
		GRC Masterclass Program 2023 "Methodology and Environmental and Social Management Systems"	25 Oktober 2023 melalui Zoom Meeting	BSE BUMN

* Berhenti masa jabatan karena meninggal dunia tanggal 12 Agustus 2023.

** Diangkat berdasarkan RUPSLB tanggal 11 Januari 2023 dan efektif sejak 07 Juni 2023.

Program Orientasi Bagi Komisaris Baru

Perseroan senantiasa mengadakan Program Orientasi atau Pengenalan bagi anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat agar saling mengenal dan menjalin kerja sama sebagai satu tim yang solid, komprehensif, efektif. Program orientasi tersebut juga bertujuan untuk memberikan pengetahuan mengenai kondisi Perseroan secara umum. Ketentuan terkait program pengenalan Dewan Komisaris telah diatur Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, meliputi:

1. Pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dan *Business Ethics* di Perseroan.
2. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi serta hal lain yang tidak diperbolehkan.
3. Gambaran mengenai Perseroan berkaitan dengan tujuan, sifat dan lingkup kegiatan Perseroan, kinerja keuangan, strategi, rencana jangka pendek dan jangka panjang Perseroan, risiko, pengendalian internal dan masalah-masalah strategis lainnya.
4. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal serta Komite Audit.

Pada tahun 2023 telah diangkat anggota Dewan Komisaris baru dalam RUPS Luar Biasa Perseroan tanggal 11 Januari 2023 yaitu Sdr. Mohamad Yusuf Permana sebagai Komisaris. Program orientasi bagi anggota baru Dewan Komisaris dilaksanakan pada tanggal 30 - 31 Januari 2023 dengan topik sebagai berikut:

1. Tujuan dan lingkup kegiatan Perseroan sesuai Anggaran Dasar;
2. Kinerja keuangan, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, serta posisi kompetitif Perseroan;
3. Manajemen risiko dan tingkat kesehatan bank;
4. Sistem pengendalian internal, audit internal, dan audit eksternal;
5. Fasilitas anggota Dewan Komisaris;
6. Kepatuhan, tata kelola Perseroan, pola hubungan kerja Dewan Komisaris dan Direksi, dan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris;
7. Budaya Perseroan; dan
8. Tata kelola kebijakan dan prosedur.

Rekomendasi, Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris, Serta Pengawasan Implementasi Strategi Perseroan

Dewan Komisaris telah melakukan tugas pengawasan, mengarahkan, memberikan saran, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Perseroan antara lain:

1. Reviu Kinerja Perseroan secara *Bankwide* dan UUS secara berkala;
2. *Monitoring* pelaksanaan inisiatif strategis rencana perusahaan secara berkala;
3. *Monitoring* pelaksanaan manajemen risiko secara berkala termasuk profil risiko, Tingkat kesehatan Bank, KPMM, *risk appetite*, *risk tolerance*, dan *recovery plan*;
4. *Monitoring* penyelesaian dokumen kredit;
5. *Monitoring* pelaksanaan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT);
6. Persetujuan rencana audit tahunan dan *monitoring* pelaksanaan audit termasuk tindak lanjut audit internal dan eksternal;
7. Rekomendasi dan Penetapan *Key Performance Indicator* (KPI) Kolegial, Individual, dan PMN termasuk perubahannya;
8. Pengawasan Dewan Komisaris atas Kinerja dan Pelaksanaan Rencana Bisnis Bank;
9. Penyesuaian Rencana Bisnis Bank dan Rencana Kerja & Anggaran Perseroan;
10. Pengembangan Organisasi Perseroan dan strategi pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM);
11. Pelaksanaan keputusan RUPS Tahunan sebagai berikut:
 - a. Pengesahan Laporan Tahunan, Laporan Keuangan, dan Laporan Keuangan PUMK;
 - b. Penetapan penggunaan laba bersih;
 - c. Penetapan remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas, dan tunjangan) dan Tantiem bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
 - d. Penunjukan AP dan/atau KAP untuk mengaudit Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan Program PUMK;
 - e. Persetujuan atas Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) Perseroan;
 - f. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Bank BTN Tahap II Tahun 2022 dan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Penawaran Umum Terbatas II (PMHMETD II);
 - g. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
 - h. Perubahan Susunan dan Penetapan Remunerasi Dewan Pengawas Syariah UUS Perseroan;
 - i. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
12. Pelaksanaan keputusan RUPS Luar Biasa berupa Persetujuan atas Perubahan Susunan Pengurus Perseroan;
13. Rekomendasi Perubahan Susunan Dewan Pengawas Syariah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk;
14. Rekomendasi penunjukkan Jasa Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk audit atas laporan keuangan historis tahunan Perseroan dan Laporan Keuangan PUMK;
15. Penunjukkan Jasa Pemingkat Rating Korporasi Perseroan;

16. Kebijakan strategis lainnya, antara lain menyangkut:
- Rencana Audit Tahunan (*Annual Audit Plan*) termasuk anggarannya.
 - Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*).
 - Kecukupan kebijakan pengendalian intern.
 - Pemberian Kredit/Pembiayaan kepada Pihak Terkait.
 - Arahan terhadap Keputusan rapat Komite Kredit.
 - Arahan terhadap implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan.
 - Aktivitas Operasional termasuk Infrastruktur dan Operasional Teknologi Informasi.
 - Aktivitas dan Pengelolaan Perkreditan dan Pembiayaan;
 - Publikasi Laporan Keuangan.
 - Produk Baru Bank (PBB) dan Kegiatan untuk Kepentingan Bank (KukB).
 - Laporan Kepatuhan.
 - Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan.
 - Evaluasi Jasa Audit atas oleh Kantor Akuntan Publik atas Informasi Keuangan Tahunan.
 - Persetujuan Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Perusahaan dan Rekomendasi pengangkatan SEVP.
 - Rekomendasi *Nominated Talent* BoD-1 dan *BoD Existing* kepada CTC Jasa Keuangan.
 - Usulan remunerasi Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah serta tantiem Dewan Komisaris dan Direksi.
 - Arahan terhadap penerapan tata kelola perusahaan.

Penilaian Kinerja Direksi dan Dewan Komisaris

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, Dewan Komisaris dan Direksi berkomitmen untuk memiliki kebijakan dan melaksanakan penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi. Dewan Komisaris memiliki kebijakan penilaian sendiri (*self assessment*) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, sedangkan penilaian kinerja Direksi dilakukan melalui pencapaian KPI yang mengacu kepada hasil pengukuran yang dilakukan oleh auditor eksternal yang mengaudit laporan keuangan tahunan perusahaan.

Penilaian Kinerja Direksi

Penilaian kinerja Direksi, termasuk Direktur Utama, baik secara kolegal dan individu dilaksanakan sekali dalam 1 (satu) dan telah dilaksanakan pada tahun 2023.

PROSEDUR PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA DIREKSI

Prosedur penetapan dan penilaian kinerja Direksi merujuk pada Peraturan Menteri BUMN nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara dan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-306/MBU/11/2023 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) pada BUMN. Direksi BUMN wajib menandatangani Kontrak Manajemen Tahunan yang memuat target KPI Direksi secara kolegal dan KPI Direksi secara individual.

KPI Direksi secara kolegal dan KPI Direksi secara individual menjadi salah satu alat ukur yang efektif dalam pemantauan kinerja dan pelaksanaan tugas Pengurus Perseroan yang dilakukan oleh Direksi. Prosedur penetapan dan penilaian KPI diatur dalam pasal 104 dan 105 Peraturan Menteri BUMN PER-2/MBU/03/2023 sebagai berikut:

- Direksi menyampaikan usulan KPI Direksi secara kolegal kepada RUPS/Menteri untuk ditetapkan bersamaan dengan penetapan RKAP.
- Sebelum mengesahkan RKAP, Dewan Komisaris wajib berkonsultasi terlebih dahulu dengan pemegang saham negara untuk penetapan KPI Direksi.
- Direksi wajib menjabarkan KPI Direksi secara kolegal menjadi KPI Direksi secara individual dan menyampaikan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan.
- Pencapaian KPI Direksi secara kolegal dilaporkan dalam laporan triwulanan dan laporan tahunan.
- Perhitungan pencapaian KPI Direksi secara kolegal dan secara individual direviu oleh kantor akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan perusahaan.

KRITERIA PENILAIAN KINERJA DIREKSI

Penilaian Kinerja Direksi Kolegal

KPI yang digunakan untuk mengukur dan menilai kinerja Direksi secara kolegal dalam pengurusan perusahaan terdiri dari 5 (lima) perspektif yaitu sebagai berikut:

- Nilai ekonomi dan sosial untuk Indonesia;
- Inovasi model bisnis;
- Kepemimpinan teknologi;
- Peningkatan investasi; dan
- Pengembangan talenta.

Penilaian Kinerja Direksi Individual

KPI Direksi secara kolegal merupakan KPI Direktur Utama. Sedangkan KPI Direksi secara individual merupakan *cascading* atas KPI Direktur Utama berdasarkan tugas, fungsi, dan tanggung jawab masing-masing Direktorat.

No	Indikator	Dirut	Wadirut	Consumer	Distribution & Funding	Institutional Banking	Assets Management	IT & Digital	Finance	Risk Management	HCCL	SEVP WB	SEVP Ops
A. Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia													
A. 1. Aspek Finansial													
1	PPOP	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2	PPOP Growth	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
3	Total Shareholder Return	√	√						√				
4	Market Cap	√	√						√			√	√
5	ROE Tier 1 Capital	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
6	CAR	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
A. 2. Aspek Operasional													
7	LaR	√	√	√			√			√		√	
8	CKPN to LaR	√	√	√			√		√	√		√	
9	Cost of Credit (CoC)	√	√	√			√			√		√	√
10	BOPO	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
A. 3. Aspek Sosial													
11	Realisasi Penyaluran KPR Subsidi	√	√	√									
B. Inovasi Model Bisnis													
12	Average Balance Dana Murah	√	√										
13	CASA Ratio	√	√					√					
14	Jumlah Unit Rumah yang Didanai Melalui KPR Program Rumah Milenial	√	√	√									
15	Meningkatkan Proposisi Ekosistem Digital Mortgage	√	√					√		√			
C. Kepemimpinan Teknologi													
16	Implementasi Integrasi ATM (Project Jalin) dan EDC Payment	√	√					√					
17	Cyber Security Breach (Zero Incident)	√	√					√					
18	IT Maturity Level	√	√					√					
D. Pengembangan Investasi													
19	Environment, Social, Governance (ESG) Rating	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
20	Risk Management Maturity Index	√	√							√			

No	Indikator	Dirut	Wadirut	Consumer	Distribution & Funding	Institutional Banking	Assets Management	IT & Digital	Finance	Risk Management	HCCL	SEVP WB	SEVP Ops
21	Jumlah Nasabah Retail yang Menggunakan Fasilitas Digital Mortgage Ecosystem	√	√					√					
22	Tingkat Ketercapaian KPI PMN	√	√										
E. Pengembangan Talenta													
23	Implementasi/ Penyusunan Kebijakan Terkait Talent Development & Career Path Sistem Di Lingkup Holding/ Klaster	√	√								√		
24	Rasio Pemenuhan Kualifikasi Organ Pengelola Risiko	√	√								√		
25	Penyelesaian Penyusunan Road Map Dana Pensiun Manfaat Pasti	√	√						√		√		
26	Rasio Perempuan Dalam Nominated Talent	√	√								√		
27	Rasio Top Talent Muda (≤ 42 Tahun) Dalam Nominated Talent	√	√								√		

PIHAK YANG MELAKUKAN PENILAIAN

Kinerja Direksi yang dinilai berdasarkan perhitungan pencapaian KPI Direksi secara kolegal dan secara individual mengacu kepada hasil pengukuran yang dilakukan oleh auditor eksternal yang mengaudit laporan keuangan tahunan perusahaan. Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Remunerasi dan Nominasi melakukan penilaian atas kinerja Direksi baik secara kolegal maupun individu. Selanjutnya, Dewan Komisaris menyampaikan hasil penilaian kinerja Direksi untuk dilaporkan kepada pemegang saham. Mengacu pasal 105 ayat (1) PER-2/MBU/03/2023, pencapaian KPI Direksi secara kolegal dilaporkan dalam laporan triwulanan dan laporan tahunan.

HASIL PENILAIAN KINERJA DIREKSI

Penilaian kinerja Direksi sudah dilakukan selama tahun 2023 dengan hasil penilaian sebagai berikut:

KPI Kolegal Tahun 2023 Audited PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

No	Indikator	Satuan	Bobot	Target	Real	Pencapaian	Nilai Akhir
A. Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia							
A. 1. Aspek Finansial							
1	PPOP	Rp triliun	6,00%	8,00	8,24	102,91%	6,17%
2	PPOP Growth	%	3,00%	0,36	3,28	110,00%	3,30%
3	Total Shareholder Return	%	3,00%	10,59	4,02	37,96%	1,14%
4	Market Cap	Rp triliun	3,00%	20,34	17,54	86,23%	2,59%

No	Indikator	Satuan	Bobot	Target	Real	Pencapaian	Nilai Akhir
5	ROE Tier 1 Capital	%	3,00%	12,16	13,86	110,00%	3,30%
6	CAR	%	4,00%	19,30	20,07	104,01%	4,16%
A. 2. Aspek Operasional							
7	LaR	%	3,00%	20,99	21,10	99,49%	2,98%
8	CKPN to LaR	%	3,00%	23,40	22,15	94,64%	2,84%
9	Cost of Credit (CoC)	%	3,00%	1,28	1,19	107,01%	3,21%
10	BOPO	%	3,00%	87,04	86,10	101,08%	3,03%
A. 3. Aspek Sosial							
11	Realisasi Penyaluran KPR Subsidi	Rp triliun	6,00%	25,68	26,29	102,39%	6,14%
B. Inovasi Model Bisnis							
12	Average Balance Dana Murah	Rp triliun	4,00%	167,89	159,29	94,87%	3,79%
13	CASA Ratio	%	4,00%	53,15	53,73	101,08%	4,04%
14	Jumlah Unit Rumah Yang Didanai Melalui KPR Program Rumah Milenial	Unit	5,00%	28.600	31.355	109,63%	5,48%
15	Meningkatkan Proposisi Ekosistem Digital Mortgage	%	5,00%	100,00	110,00	110,00%	5,50%
C. Kepemimpinan Teknologi							
16	Implementasi Integrasi ATM (Project Jalin) dan EDC Payment	Waktu	5,00%	100,00	108,62	108,62%	5,43%
17	Cyber Security Breach (Zero Incident)	Unit	3,00%	0,00	0,00	100,00%	3,00%
18	IT Maturity Level	Level	3,00%	3,30	3,40	103,03%	3,09%
D. Pengembangan Investasi							
19	Environment, Social, Governance (ESG) Rating	Rating	4,00%	Medium Risk	Medium Risk	100,00%	4,00%
20	Risk Management Maturity Index	Index	3,00%	3,25	3,40	104,62%	3,14%
21	Jumlah Nasabah Retail Yang Menggunakan Fasilitas Digital Mortgage Ecosystem	Nasabah	5,00%	180.000	209.218	110,00%	5,50%
22	Tingkat Ketercapaian KPI PMN	%	9,00%	100,00	103,47	103,47%	9,31%
E. Pengembangan Talenta							
23	Implementasi/Penyusunan Kebijakan Terkait Talent Development & Career Path System Di Lingkup Holding/Klaster	%	2,00%	100,00	110,00	110,00%	2,20%
24	Rasio Pemenuhan Kualifikasi Organ Pengelola Risiko	%	2,00%	100,00	100,00	100,00%	2,00%
25	Penyelesaian Penyusunan Road Map Dana Pensiun Manfaat Pasti	%	2,00%	100,00	110,00	110,00%	2,20%
26	Rasio Perempuan Dalam Nominated Talent	%	2,00%	18,50	20,51	110,00%	2,20%
27	Rasio Top Talent Muda (≤ 42 Tahun) Dalam Nominated Talent	%	2,00%	22,75	30,38	110,00%	2,20%
Total							101,96%

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Penilaian kinerja Dewan Komisaris baik secara kolegal dan individu dilaksanakan sekali dalam 1 (satu) tahun dan telah dilaksanakan pada tahun 2023.

PROSEDUR PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS

Prosedur Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dilakukan dengan penilaian mandiri (*self assessment*) berdasarkan Peraturan Menteri BUMN nomor PER-3/MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara dan Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara No. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN.

KRITERIA PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS

Kriteria Penilaian Kinerja Dewan Komisaris Secara Kolegial

Kriteria penilaian kinerja yang digunakan adalah sesuai pelaksanaan fungsi Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi demi kepentingan Perseroan dan Pemegang Saham pada khususnya, serta pemangku kepentingan pada umumnya. Kriteria pokok penilaian kinerja Dewan Komisaris mencakup:

1. Aspek perencanaan, pengawasan, dan pengarah/pengarahan/penasihat;
2. Aspek pelaporan;
3. Aspek kinerja Perseroan;
4. Aspek lainnya sesuai kebutuhan.

HASIL PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS

Hasil Penilaian Kinerja Dewan Komisaris Secara Kolegial

Hasil pencapaian kinerja Dewan Komisaris selama tahun 2023 terhadap target pada Indikator Kinerja Utama atau *Key Performance Indicators* (KPI) yang ditentukan pada program kerja disampaikan sebagai berikut:

No	Program Kerja	Bobot (%)	Realisasi	Target	Penc. (%)	Nilai
I	Aspek Perencanaan, Pengawasan dan Pengarah/Penasihat	65				89,44
1	Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan RBB dan RKAP Tahunan Bank	10	12	6	200,00	20,00
2	Monitoring, Evaluasi, dan Tanggapan terhadap Pelaksanaan Budaya Kerja dan Tata Kelola (GCG) Pengurusan Bank.	15	12	12	100,00	15,00
3	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil/Temuan Audit Internal/Eksternal Bank.	5	20	12	166,67	8,33
4	Memberi Persetujuan, Penasihat, dan Konsultasi kepada Direksi	10	12	12	100,00	10,00
5	Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris dan/atau Rapat Bersama Direksi.	10	64	36	177,78	17,78
6	Analisis Kinerja dan Manajemen Risiko Bulanan (Sesuai Format KBUMN)	10	10	12	83,33	8,33
7	Pemetaan <i>Talent Pool</i> (<i>track record</i>) BOD-1 (berdasarkan integritas dan <i>performance</i>)	5	2	1	200,00	10,00
II	Aspek Pelaporan	15				37,50
8	Menyampaikan Laporan Program Kerja Tahunan dan RBB Bank kepada RUPS	5	4	1	400,00	20,00
9	Menyampaikan Laporan/Pendapat Tentang Tugas Pengawasan kepada Pemegang Saham Pengendali – Kementerian BUMN dan OJK.	10	7	4	175,00	17,50
III	Aspek Kinerja Perusahaan	15				25,83
10	Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Kinerja serta Tingkat Kesehatan Bank, mencakup: Profil Risiko, Tata Kelola (GCG), Rentabilitas, dan Permodalan Bank.	10	12	6	200,00	20,00
11	Monitoring dan Evaluasi Strategi Pengembangan <i>Talent</i> serta Kultur Perusahaan yang <i>High Performing</i> .	5	7	6	116,67	5,83
IV	Aspek Dinamis/Lain-Lain	5				17,50
12	Peningkatan Kompetensi yang terkait dengan tugas dan tanggung jawab Pengawasan.	5	7	2	350,00	17,50
JUMLAH		100			170,28	

Kriteria Penilaian Kinerja Dewan Komisaris Secara Individual

Kriteria pokok penilaian kinerja Dewan Komisaris secara individual mencakup:

1. Prestasi kerja
2. Prilaku kerja
3. Tugas Tambahan/*Ad hoc*

PIHAK YANG MELAKUKAN PENILAIAN

Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilaksanakan dengan mekanisme penilaian sendiri (*self assessment*) dan dilaporkan atau disampaikan secara berkala kepada pemegang saham.

Hasil Penilaian Kinerja Dewan Komisaris Secara Individual

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN, Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi secara tahunan terhadap setiap individu anggota Dewan Komisaris. Metode yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris dalam penilaian kinerja anggota Dewan Komisaris adalah dengan metode penilaian mandiri (*self assessment*) untuk kemudian direviu dan disetujui oleh Dewan Komisaris. Penilaian dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama yang spesifik, terukur, dapat dicapai, dan relevan.

Penilaian kinerja anggota Dewan Komisaris sudah dilakukan selama tahun 2023 dengan hasil penilaian berdasarkan indikator kinerja utama sebagai berikut:

No.	Indikator	Chandra M. Hamzah	Iqbal Latanro	Armand B. Arief	Sentot A. Sentausa	Andin Hadiyanto	Herry Trisaputra Zuna	Himawan Arief Sugoto	Mohamad Yusuf Permana
Prestasi Kerja									
1.	Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan RBB dan RKAP Tahunan Bank								
2.	Monitoring, Evaluasi, dan Tanggapan terhadap Pelaksanaan Budaya Kerja dan Tata Kelola (GCG) Pengurusan Bank.								
3.	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil/Temuan Audit Internal/ Eksternal Bank.								
4.	Memberi Persetujuan, Penasihat, dan Konsultasi kepada Direksi	80	80	80	80	80	80	80	80
5.	Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris dan/ atau Rapat Bersama Direksi.								
6.	Analisis Kinerja dan Manajemen Risiko Bulanan (Sesuai Format KBUMN)								
7.	Pemetaan <i>Talent Pool (track record)</i> BOD-1 (berdasarkan integritas dan <i>performance</i>)								
8.	Menyampaikan Laporan Program Kerja Tahunan dan RBB Bank kepada RUPS								

No.	Indikator	Chandra M. Hamzah	Iqbal Latanro	Armand B. Arief	Sentot A. Sentausa	Andin Hadiyanto	Herry Trisaputra Zuna	Himawan Arief Sugoto	Mohamad Yusuf Permana
9.	Menyampaikan Laporan/Pendapat Tentang Tugas Pengawasan kepada Pemegang Saham Pengendali – Kementerian BUMN dan OJK.								
10.	Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Kinerja serta Tingkat Kesehatan Bank, mencakup: Profil Risiko, Tata Kelola (GCG), Rentabilitas, dan Permodalan Bank.								
11.	Monitoring dan Evaluasi Strategi Pengembangan Talent serta Kultur Perusahaan yang High Performing.								
12.	Peningkatan Kompetensi yang terkait dengan tugas dan tanggung jawab Pengawasan.								
Perilaku Kerja									
	AKHLAK	18,80	18,65	18,60	19,40	18,60	18,60	18,00	18,00
Tugas Tambahan/Ad hoc									
1.	Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi serta Anggota CTC Kementerian BUMN	1,00	-	-	-	-	-	-	-
2.	Ketua Komite Audit	-	1,00	-	-	-	-	-	-
3.	Ketua Komite Pemantau Risiko	-	-	1,00	-	-	-	-	-
Total Pencapaian Key Performance Indicators (KPI)		99,80	99,65	99,60	99,40	98,60	98,60	98,00	98,00
Predikat		Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
Keterangan:									
Nilai		Predikat	Nilai	Predikat	Nilai	Predikat	Nilai	Predikat	
<60		Tidak Baik	<80	Cukup Baik	<100	Sangat baik			
<70		Kurang Baik	<90	Baik	100	Istimewa			

Penilaian Kinerja Komite di Bawah Dewan Komisaris dan Dasar Penilaiannya

Dewan Komisaris dibantu oleh 3 (tiga) komite yaitu Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi, serta Komite Pemantau Risiko. Dewan Komisaris secara berkala melakukan penilaian atas efektivitas kinerja Komite-komite di bawah Dewan Komisaris. Penilaian dimaksud didasarkan pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara nomor PER-3/MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan OJK nomor 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. Dewan Komisaris menilai bahwa selama tahun 2023, Komite-komite telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan cukup efektif. Hasil penilaian kinerja komite di bawah Dewan Komisaris adalah sebagai berikut.

Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kinerja Komite di Bawah Dewan Komisaris

Dewan Komisaris dibantu oleh 3 (tiga) komite yaitu Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi, serta Komite Pemantau Risiko. Dewan Komisaris secara berkala melakukan penilaian atas efektivitas kinerja Komite-komite di bawah Dewan Komisaris. Penilaian dimaksud didasarkan pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara nomor PER-3/MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan OJK nomor 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Kriteria Penilaian Kinerja Komite di Bawah Dewan Komisaris

Penilaian kinerja Komite Audit didasarkan pada tolok ukur atau kriteria penilaian yang spesifik, terukur, dapat dicapai, dan relevan yang termuat dalam indikator penilaian kinerja utama dengan aspek-aspek sebagai berikut:

1. Aspek Reguler.
2. Aspek Non-Reguler (Pengembangan Kompetensi).
3. Aspek Lain-lain (Jumlah penyelenggaraan rapat Komite).

Penilaian Komite Audit dievaluasi berdasarkan kertas kerja Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Utama	Bobot (%)	Realisasi Des-23	Target Des-23	Pencapaian	Nilai (%)
		a	b	c	d=b/c	e=dxa
I	Reguler	75				76,25
1	Memberikan rekomendasi Persetujuan atas <i>Annual Audit Plan</i> kepada Dewan Komisaris	10	1	1	100%	10,00
2	Pemantauan dan evaluasi bulanan terhadap pelaksanaan tugas dan tindak lanjut Audit Internal	10	12	12	100%	10,00
3	Menghadiri <i>Exit Meeting</i> Audit Umum Internal	5	5	4	125%	6,25

Penilaian kinerja Komite Remunerasi dan Nominasi didasarkan pada tolok ukur atau kriteria penilaian yang spesifik, terukur, dapat dicapai, dan relevan yang termuat dalam indikator penilaian kinerja utama yang termuat dalam indikator penilaian kinerja utama dengan aspek-aspek sebagai berikut:

1. Aspek Reguler.
2. Aspek Non-Reguler.
3. Aspek Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Komite.
4. Aspek Tugas Khusus dan lain-lain (Jumlah penyelenggaraan rapat Komite).

Penilaian kinerja Komite Pemantau Risiko didasarkan pada tolok ukur atau kriteria penilaian yang spesifik, terukur, dapat dicapai, dan relevan yang termuat dalam indikator penilaian kinerja utama dengan aspek-aspek sebagai berikut:

1. Aspek Pemenuhan Tugas dan Tanggung Jawab.
2. Aspek Perencanaan dan Pelaporan.
3. Aspek Operasional dan Pengembangan Kompetensi (pengembangan kompetensi dan jumlah penyelenggaraan rapat Komite).
4. Aspek Dinamis (Tugas Lainnya sesuai dengan Bidang Manajemen Risiko).

Pihak yang Melakukan Penilaian

Evaluasi kinerja Komite di bawah Dewan Komisaris dilakukan secara berkala dengan metode penilaian mandiri (*self assessment*) untuk kemudian disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk direviu dan disetujui.

Hasil Penilaian Kinerja Komite di Bawah Dewan Komisaris

PENCAPAIAN KINERJA KOMITE AUDIT

Dewan Komisaris menilai bahwa selama tahun 2023, Komite-komite telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan cukup efektif. Hasil penilaian kinerja komite di bawah Dewan Komisaris adalah sebagai berikut.

No	Indikator Kinerja Utama	Bobot (%)	Realisasi Des-23	Target Des-23	Pencapaian	Nilai (%)
		a	b	c	d=b/c	e=dxa
4	Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Audit Eksternal (OJK, BI, BPK, KAP, dll) dan tindak lanjut hasil audit, termasuk terhadap pengendalian internal	5	4	4	100%	5,00
5	Pengecekan dan evaluasi terhadap Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan	5	4	4	100%	5,00
6	Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan KAP kepada Dewan Komisaris	5	1	1	100%	5,00
7	Pemantauan dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit oleh KAP atas Informasi Keuangan untuk Tahun Buku	5	1	1	100%	5,00
8	Menelaah, mengevaluasi dan memberikan masukan kepada Dewan Komisaris terkait materi <i>Performance Review</i> bulanan	5	12	12	100%	5,00
9	Menyusun laporan triwulanan dan tahunan mengenai kegiatan Komite Audit kepada Dewan Komisaris	5	4	4	100%	5,00
10	Menyusun Tanggapan Dewan Komisaris atas Kinerja Perseroan (Triwulanan) yang disampaikan kepada Menteri BUMN	5	4	4	100%	5,00
11	Menyusun Laporan Pengawasan Dewan Komisaris atas Realisasi RBB (Semesteran) untuk disampaikan kepada OJK	5	2	2	100%	5,00
12	Menyusun Kertas Kerja <i>Self Assessment</i> GCG semesteran terkait dengan Komite Audit	5	2	2	100%	5,00
13	Menyusun Laporan Tahunan (<i>Annual Report</i>) terkait dengan Komite Audit	5	1	1	100%	5,00
II	Non-Reguler	10				15,00
14	Menyampaikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk pengendali mutu independen dari pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang terhadap kinerja SKAI	5	1	1	100%	5,00
15	Pengembangan Kompetensi yang berhubungan dengan Tugas dan Tanggung Jawab	5	3	1	200%	10,00
IV	Lain-Lain	15				25,00
16	Rapat Komite Audit	10	35	6	200%	20,00
17	Rapat Koordinasi Anggota Komite Dewan Komisaris	5	4	4	100%	5,00
JUMLAH		100				116,25

Pencapaian Kinerja Komite Remunerasi dan Nominasi

Evaluasi kinerja Komite Remunerasi dan Nominasi dilakukan secara berkala dengan metode penilaian mandiri (*self assessment*) untuk kemudian direviu dan disetujui oleh Dewan Komisaris. Penilaian didasarkan pada tolok ukur atau kriteria penilaian yang spesifik, terukur, dapat dicapai, dan relevan yang termuat dalam indikator penilaian kinerja utama yang termuat dalam indikator penilaian kinerja utama dengan aspek-aspek sebagai berikut:

1. Aspek Reguler.
2. Aspek Non-Reguler.
3. Aspek Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Komite.
4. Aspek Tugas Khusus dan lain-lain.

Penilaian Komite Remunerasi dan Nominasi dievaluasi berdasarkan kertas kerja Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

No.	Productivity	Bobot (%)	Realisasi	Target	Pencapaian	Nilai
I	Reguler	55				67.50
1	Penelaahan Rencana Kegiatan Pendidikan Tahun 2023	5	0	1	50%	0.00
2	Validasi atas Usulan Selected Talent BOD-1 Bank BTN	5	1	2	100%	2.50
3	Rekomendasi dan Penilaian Calon Anggota BOC dan BOD untuk Fit & Proper Test terkait dengan pelaksanaan RUPS Tahunan atau Luar Biasa	5	2	2	100%	5.00
4	Penelaahan Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Bisnis Bank (RBB)	5	1	1	100%	5.00
5	Penelaahan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB)	5	1	1	100%	5.00
6	Penelaahan KPI Kolegal dan Individual BOD	5	2	1	200%	10.00
7	Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas	5	2	1	200%	10.00
8	Penetapan Besaran Tantiem dan Bonus serta Insentif lain yang terkait untuk BOD dan BOC	5	2	1	200%	10.00
9	Merancang Program Kerja Dewan Komisaris	5	1	1	100%	5.00
10	Menyampaikan Laporan Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola Bank (<i>Self Assessment GCG</i>)	5	2	1	200%	10.00
11	Laporan Komite Remunerasi dan Nominasi	5	4	4	100%	5.00
II	Non Reguler	20				20.00
12	Evaluasi Kebijakan / SOP <i>Human Capital, Strategy</i> , dan <i>Learning</i>	5	2	1	200%	10.00
13	Evaluasi Kebijakan / Implementasi SOP Tengah Alih Daya	5	0	1	0%	0.00
14	Penetapan Corporate Secretary Head dan Internal Audit Head	5	1	1	100%	5.00
15	Penetapan SEVP untuk beberapa posisi sesuai struktur Organisasi terbaru	5	2	2	100%	5.00
III	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Komite	10				11.67
16	Melakukan komunikasi dengan Satuan Kerja Sumber Daya Manusia	10	7	6	117%	11.67
IV	Tugas Khusus dan Lain - Lain	15				101.67
17	Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi	10	23	3	767%	76.67
18	Tugas lain dari Ketua Komite/Dewan Komisaris	5	5	1	500%	25.00
Jumlah		100				200.83

Pencapaian Kinerja Komite Pemantau Risiko

Evaluasi kinerja Komite Pemantau Risiko dilakukan secara berkala dengan metode penilaian mandiri (*self assessment*) untuk kemudian direviu dan disetujui oleh Dewan Komisaris. Penilaian didasarkan pada tolok ukur atau kriteria penilaian yang spesifik, terukur, dapat dicapai, dan relevan yang termuat dalam indikator penilaian kinerja utama dengan aspek-aspek sebagai berikut:

1. Aspek Pemenuhan Tugas dan Tanggung Jawab;
2. Aspek Perencanaan dan Pelaporan;
3. Aspek Operasional;
4. Pengembangan Kompetensi; dan
5. Aspek Dinamis.

Penilaian Komite Pemantau Risiko dievaluasi berdasarkan kertas kerja Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Utama	Bobot (%)	Satuan	Realisasi	Target	Pencapaian	Nilai (%)
		a	b	c	d	e=c/d	f=dxa
I	Aspek Pemenuhan Tugas dan Tanggung Jawab	60					67,5
1	Melakukan Penelaahan Laporan Profil Risiko	10	unit	5	4	125	12,5
2	Menyampaikan Reviu dan Masukan terkait <i>Risk Appetite</i> dan <i>Risk Tolerance</i>	10	unit	2	2	100	10
3	Melakukan Penelaahan Laporan Tingkat Kesehatan Bank	5	unit	3	1	200	10
4	Melakukan Penelaahan Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Bisnis Bank (RBB)	5	unit	2	1	200	10
5	Melakukan Penelaahan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB)	5	unit	1	1	100	5
6	Melakukan Penelaahan Penginian <i>Recovery Plan</i>	5	unit	1	1	100	5
7	Melakukan Penelaahan Penyusunan <i>Resolution Plan</i>	5	unit	0	1	0	0
8	Melakukan Kajian terhadap Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko (PKMR)	5	unit	1	1	100	5
9	Melakukan Penelaahan terhadap Laporan Kepatuhan	5	unit	4	4	100	5
10	Menyampaikan Laporan Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola Bank	5	unit	2	2	100	5
II	Aspek Perencanaan dan Pelaporan	15					15
11	Menyampaikan Laporan Realisasi Kegiatan Triwulanan	5	unit	4	4	100	5
12	Menyampaikan Laporan Realisasi Kegiatan Tahunan	5	unit	1	1	100	5
13	Menyampaikan Program Kerja Tahunan untuk Tahun Berikutnya	5	unit	1	1	100	5
III	Aspek Operasional dan Pengembangan Kompetensi	15					30,00
14	Melaksanakan Rapat Komite	10	unit	52	6	200	20
15	Pengembangan Kompetensi yang Berhubungan dengan Tugas dan Tanggung Jawab	5	unit	8	1	200	10
IV	Aspek Dinamis	10					11,11
16	Melakukan Tugas Lainnya sesuai dengan Bidang Manajemen Risiko	10	%	100	90	111,11	11,11
JUMLAH		100					123,61

Mekanisme Pemberhentian dan Pengunduran Diri Anggota Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS apabila dengan alasan yang bersangkutan terbukti melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik.
2. Melanggar ketentuan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan.
3. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau negara.
4. Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai anggota Dewan Komisaris.
5. Dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
6. Mengundurkan diri.

Keputusan pemberhentian karena alasan tersebut di atas diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri dalam RUPS. Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan oleh RUPS berdasarkan alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS.

Dalam hal terjadi hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan, maka RUPS berwenang memberhentikan salah seorang di antara mereka.

Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatan berakhir dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.

Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:

1. Pengunduran dirinya telah efektif.
2. Meninggal dunia.
3. Masa jabatannya berakhir.
4. Diberhentikan berdasarkan RUPS.
5. Dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan pengadilan.
6. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya, termasuk karena memangku jabatan rangkap yang dilarang.

Nominasi dan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris

Prosedur Nominasi Direksi dan Dewan Komisaris

Prosedur Nominasi Direksi

Prosedur nominasi Direksi telah diatur dalam Kebijakan Khusus No. KK.6-F tanggal 25 Agustus 2023 tentang Prosedur Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*). Adapun prosedur nominasi Direksi adalah sebagai berikut:

1. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.
2. Pemilihan calon anggota Direksi dilakukan melalui proses seleksi dan nominasi yang transparan, memperhatikan rekomendasi Dewan Komisaris berdasarkan kajian dari Komite Remunerasi dan Nominasi, dengan mempertimbangkan keahlian, integritas, kejujuran, kepemimpinan, pengalaman, perilaku dan dedikasi, serta kecukupan waktunya demi kemajuan Perseroan.
3. Calon anggota Direksi yang merupakan pejabat internal Perseroan dapat diusulkan oleh Komisaris melalui kajian Komite Remunerasi dan Nominasi.
4. Pengangkatan anggota Direksi dilakukan melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*). Calon anggota Direksi yang lulus wajib menandatangani kontrak manajemen sebelum diangkat menjadi Direksi.

Prosedur Nominasi Dewan Komisaris

Prosedur nominasi Dewan Komisaris telah diatur dalam Kebijakan Khusus No. KK.6-F tanggal 25 Agustus 2023 tentang Prosedur Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*) serta Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris. Adapun prosedur nominasi Dewan Komisaris yaitu:

1. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.
2. Pemilihan calon anggota Dewan Komisaris dilakukan melalui proses seleksi hingga nominasi secara transparan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi serta mempertimbangkan kepribadian calon Dewan Komisaris meliputi integritas, kejujuran, profesionalitas, kepemimpinan, pengalaman, loyalitas, dan kecukupan waktunya demi kemajuan Perseroan.

Prosedur dan Pelaksanaan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris

Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Penyusunan kebijakan remunerasi tidak terlepas dari kemampuan Perseroan serta senantiasa berlandaskan kompetitif, adil dan berbasis risiko yang sejalan dengan arahan dan kebijakan dari OJK. Untuk menjaga remunerasi agar tetap kompetitif, Perseroan senantiasa melakukan *benchmarking* melalui survei yang dilakukan oleh pihak independen.

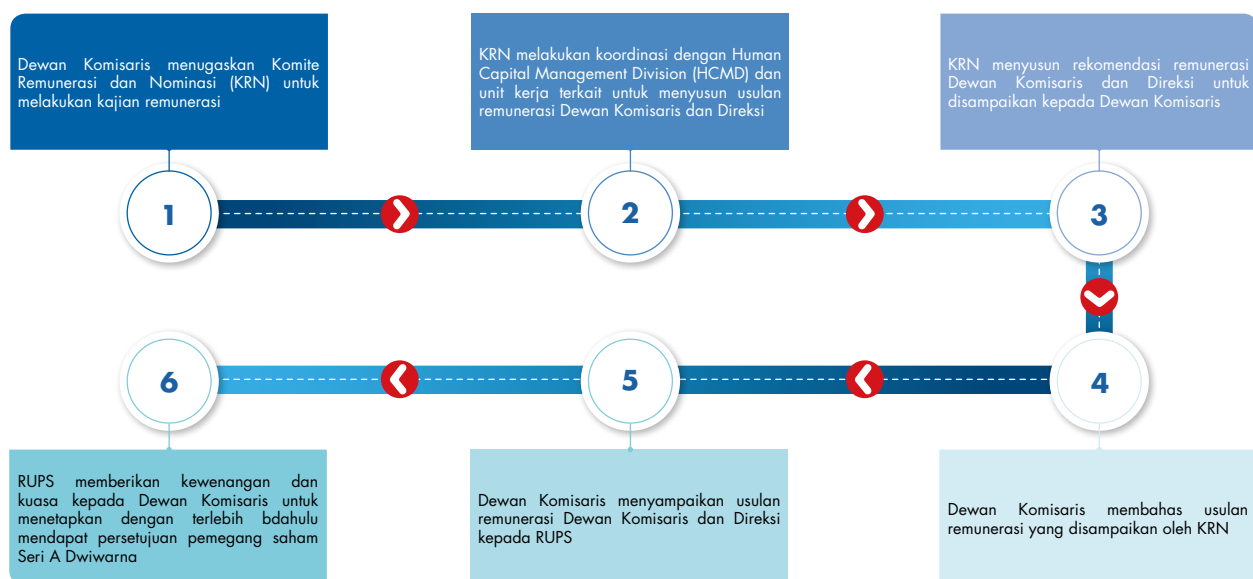
Perseroan telah menerbitkan Kebijakan Khusus (KK) No.3-B tanggal 31 Oktober 2023 tentang Remunerasi. Adapun cakupan aspek kebijakan tersebut antara lain adalah tujuan penerapan tata kelola dalam pemberian remunerasi, remunerasi yang bersifat variabel maupun material *risk takers*. Perseroan menetapkan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-3/MBU/03/2023

tanggal 20 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara serta Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-181/MBU/07/2023 tanggal 4 Juli 2023 tentang Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara Tahun 2023 yaitu besaran penghasilan Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Kebijakan yang ditetapkan di RUPS adalah memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk tahun buku 2022, serta menetapkan gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi serta memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem, gaji/honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi Direksi.

Prosedur Penetapan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris

Adapun prosedur penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi, sebagai berikut:



Cakupan dari kebijakan remunerasi yang dimiliki Perseroan telah disesuaikan dengan Peraturan OJK Nomor 5/POJK.03/2015 dan Surat Edaran OJK Nomor 40/SEOJK.03/2016 terkait dengan Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum, mencakup:

1. Prinsip kehati-hatian dalam pemberian remunerasi berbasiskan kinerja dan risiko.
2. Penentuan *Material Risk Taker* (MRT) dikategorikan sebagai berikut:
 - a. *Material Risk Takers* (MRT) dapat ditentukan dengan menggunakan metode kualitatif sesuai dengan porsi tanggung jawab yang berpengaruh terhadap profil risiko utama yang akan ditentukan sesuai dengan evaluasi profil risiko yang ditentukan Perseroan setiap tahunnya.
 - b. Penentuan kategori MRT juga dapat dilakukan secara kuantitatif melalui perbandingan pemberian remunerasi bersifat variabel antara MRT dan Pegawai non-MRT dengan pertimbangan terhadap kinerja dan juga tingkat risiko jabatan yang bersangkutan.

3. Pemberlakuan remunerasi yang bersifat variabel sesuai dengan ketentuan regulator terkait penerapan remunerasi bagi Bank umum.

Indikator Penetapan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris

Perseroan mengacu kepada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-3/MBU/03/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara serta Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-181/MBU/07/2023 tanggal 4 Juli 2023 tentang Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara Tahun 2023. Gaji/Honorarium anggota Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan antara lain berdasarkan faktor-faktor sebagai berikut:

1. Faktor skala usaha;
2. Faktor kompleksitas usaha;
3. Tingkat inflasi;
4. Kondisi dan kemampuan keuangan Perusahaan;
5. Faktor-faktor lain yang relevan, serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
6. Komposisi Gaji/Honorarium Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Gaji Direktur Utama ditetapkan dengan menggunakan pedoman internal yang ditetapkan oleh Menteri.

- b. Gaji Wakil Direktur Utama sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari gaji Direktur Utama.
- c. Gaji anggota Direksi lainnya sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dari gaji Direktur Utama.
- d. Honorarium Komisaris Utama sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari gaji Direktur Utama.
- e. Honorarium Wakil Komisaris Utama sebesar 42,5% (empat puluh dua koma lima persen) dari gaji Direktur Utama.
- f. Honorarium anggota Dewan Komisaris sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari gaji Komisaris Utama.

Remunerasi terdiri atas struktur remunerasi yang berorientasi pada pengembangan Perseroan yang berkelanjutan dan mendorong pencapaian tujuan jangka panjang.

Struktur dan Jumlah Nominal/Komponen Remunerasi Masing-Masing Direksi dan Dewan Komisaris

Struktur remunerasi yang menunjukkan jenis dan/atau imbalan jangka pendek, jangka panjang dan/atau pasca kerja adalah sebagai berikut:

1. Jenis remunerasi jangka pendek terdiri atas: Honorarium, Tunjangan (hari raya, transportasi), Fasilitas (kesehatan, bantuan hukum) dan Tantiem.
2. Jenis remunerasi jangka panjang dan/atau pasca kerja terdiri dari Asuransi Purna Jabatan dan dapat juga diberikan penghargaan jangka panjang (*long term incentive/LTI*) serta Tantiem/Insentif kerja, di mana di dalam tantiem tersebut dapat diberikan tambahan berupa penghargaan jangka panjang (*long term incentive/LTI*).

Komponen remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:



Berdasarkan Peraturan Direksi No. 02/PD/HCD/2017 perihal Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris, Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi, komponen remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Bank BTN ada yang bersifat tetap dan variabel, yaitu:

1. Remunerasi yang bersifat tetap diberikan dalam bentuk tunai yang dapat disertai dengan pemberian dalam bentuk non tunai.
2. Remunerasi yang bersifat tidak tetap diberikan dalam bentuk tunai dan saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan bank.

Remunerasi dan fasilitas yang diterima oleh masing-masing Dewan Komisaris dan Direksi dalam 1 (satu) tahun mencakup struktur remunerasi dan rincian jumlah nominal, sebagaimana tabel di bawah ini:

No	Nama	Jabatan	Biaya		Tunjangan		
			Gaji/ Honorarium	Tantiem	Tunjangan Hari Raya	Asuransi Purna Jabatan & Asuransi BPJS	
1	Chandra Hamzah	Komisaris Utama/ Independen	√	√	√	√	
2	Iqbal Latanro	Wakil Komisaris Utama/Independen	√	√	√	√	
3	Andin Hadiyanto	Komisaris	√	√	√	√	
4	Ahdi Jumhari Luddin	Komisaris Independen**	√	√	√	√	
5	Sentot A. Sentausa	Komisaris Independen	√	√	√	√	
6	Armand B. Arief	Komisaris Independen	√	√	√	√	
7	Herry Trisaputra Zuna	Komisaris	√	√	√	√	
8	Himawan Arief Sugoto	Komisaris	√	√	√	√	
9	M. Yusuf Permana	Komisaris	√	–	√	√	
JUMLAH DEWAN KOMISARIS			15.824.661.237	33.978.535.200	1.372.700.000	4.614.585.000	
1	Nixon L. P. Napitupulu	Direktur Utama	√	√	√	√	
2	Oni Febriarto Rahardjo	Wakil Direktur Utama	√	–	√	√	
3	Hirwandi Gafar	Direktur Consumer	√	√	√	√	
4	Nofry Rony Poetra	Direktur Finance	√	√	√	√	
5	Eko Waluyo	Direktur Human Capital, Compliance, and Legal	√	√	√	√	
6	Elisabeth Novie Riswanti	Direktur Assets Management	√	√	√	√	
7	Andi Nirwoto	Direktur IT & Digital	√	√	√	√	
8	Jasmin	Direktur Distribution and Funding	√	√	√	√	
9	Setiyo Wibowo	Direktur Risk Management	√	√	√	√	
10	Hakim Putratama	Direktur Institutional Banking	√	–	√	√	
JUMLAH DIREKSI			37.019.693.528	74.954.083.700	3.219.000.000	9.625.000.000	
JUMLAH DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI			52.844.354.765	108.932.618.900	4.591.700.000	14.239.585.000	

*) Diberikan kepada pejabat yang tidak menempati rumah dinas.
 **) Berhenti menjabat sejak tanggal 12 Agustus 2023 karena meninggal dunia.

		Fasilitas Lainnya				Tunjangan PPh21
	Tunjangan Perumahan*	Fasilitas Kendaraan (Sewa&BBM)	Fasilitas Kesehatan	Fasilitas Bantuan Hukum	Lainnya (Fasilitas Natura)	
	-	√	√	-	√	√
	-	√	√	-	√	√
	-	√	√	-	√	√
	-	√	√	-	-	√
	-	√	√	-	√	√
	-	√	√	-	√	√
	-	√	√	-	√	√
	-	√	√	-	√	√
	-	√	√	-	√	√
		3.049.383.290	1.220.306.805	0	19.000.000	10.194.284.700
	-	√	√	-	√	√
	√	√	√	-	√	√
	-	√	√	-	√	√
	√	√	√	-	√	√
	-	√	√	-	√	√
	√	√	√	-	√	√
	-	√	√	-	√	√
	-	√	√	-	√	√
	-	√	√	-	√	√
	√	√	√	-	√	√
	591.693.548	8.619.502.719	2.820.411.227	0	1.526.821.136	29.279.589.450
	591.693.548	11.668.886.009	4.040.718.032	0	1.545.821.136	39.473.874.150



Kebijakan Keberagaman Direksi dan Dewan Komisaris

Kebijakan keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan diatur dalam Anggaran Dasar dan *Board Manual* yang mengatur bahwa Dewan Komisaris dan Direksi merupakan perpaduan profesional-profesional yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan Perseroan sehingga memungkinkan dilakukannya proses pengambilan keputusan yang efektif, efisien dan segera. Dalam penetapan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan senantiasa berupaya agar komposisi Dewan Komisaris dan Direksi memiliki keberagaman dalam hal kompetensi, gender dan usia (adanya *top talent* muda).

Keberagaman komposisi menyesuaikan dengan kebutuhan, tingkat kompleksitas dan rencana strategis Perseroan sehingga diharapkan dalam pengembangan maupun penyelesaian terhadap suatu permasalahan dapat dipertimbangkan dari berbagai perspektif pendidikan, kompetensi serta pengalaman yang dimiliki.

Sesuai dengan kebijakan keberagaman yang ditetapkan oleh Kementerian BUMN, target rasio perempuan dalam *nominated talent* sebesar 18,5% dan target rasio *top talent* muda (≤ 42 tahun) dalam *nominated talent* sebesar 22,75%. Pencapaian target di tahun 2023 menunjukkan besarnya rasio perempuan dalam *nominated talent* sebesar 20,51% dan rasio *top talent* muda (≤ 42 tahun) dalam *nominated talent* sebesar 30,38%. Pencapaian ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Kedepannya Perseroan akan berupaya untuk konsisten dalam memastikan keberagaman Dewan Komisaris dan Direksi khususnya terkait keberagaman gender dan usia.

Keberagaman Komposisi Direksi

Keberagaman Direksi telah mempertimbangkan keberagaman jenis kelamin (*gender*) yaitu dengan adanya 1 (satu) orang perempuan yaitu Sdri. Elisabeth Novie Riswanti sebagai Direktur *Assets Management*. Berikut Keberagaman komposisi Direksi Perseroan berdasarkan usia, jenis kelamin, pendidikan, pengalaman kerja serta keahlian dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel Keberagaman Komposisi Direksi

Nama	Jabatan	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan	Pengalaman Kerja	Keahlian
Haru Koesmahargyo*	Direktur Utama	57 Tahun	Laki-laki	Sarjana (S1) Teknologi Pertanian Magister (S2) Investment Banking	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan	Teknologi Pertanian Investment Banking
Nixon L.P. Napitupulu**	Direktur Utama	54 Tahun	Laki-laki	Sarjana (S1) Ekonomi	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan	Ekonomi
Oni Febriarto Rahardjo***	Wakil Direktur Utama	52 Tahun	Laki-laki	Sarjana (S1) Teknik Magister (S2) Manajemen	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan	Manajemen
Andi Nirwoto	Direktur IT and Digital	53 Tahun	Laki-laki	Sarjana (S1) Teknik Magister (S2) Master of Finance	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan	Teknik Keuangan
Elisabeth Novie Riswanti	Direktur Assets Management	56 Tahun	Perempuan	Sarjana (S1) Hukum	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan	Hukum
Jasmin	Direktur Distribution and Funding	59 Tahun	Laki-laki	Sarjana (S1) Ekonomi Magister (S2) International Business	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan	Akuntansi Bisnis
Setiyo Wibowo	Direktur Risk Management	46 Tahun	Laki-laki	Sarjana (S1) Teknik Elektro Magister (S2) MBA in Finance & Banking	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan	Teknik Keuangan
Hirwandi Gafar	Direktur Consumer	55 Tahun	Laki-laki	Sarjana (S1) Teknik Sipil	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan	Teknik Sipil

Nama	Jabatan	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan	Pengalaman Kerja	Keahlian
Nofry Rony Poetra	Direktur Finance	55 Tahun	Laki-laki	Sarjana (S1) Ekonomi Magister (S2) MBA Business	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan	Ekonomi
Eko Waluyo	Direktur Human Capital, Compliance, and Legal	52 Tahun	Laki-laki	Sarjana (S1) Ekonomi Magister (S2) Manajemen	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan	Ekonomi Manajemen
Hakim Putratama****	Direktur Institutional Banking	47 Tahun	Laki-laki	Sarjana (S1) Ilmu Hubungan Internasional Magister (S2) Master of International Business	Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan	Ilmu Hubungan Internasional International Business

*Berhenti menjabat sejak 16 Maret 2023 berdasarkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun 2023.

** Pengalihan penugasan semula sebagai Wakil Direktur Utama menjadi Direktur Utama sejak 16 Maret 2023 dan mendapat pernyataan efektif dari OJK terhitung sejak tanggal 07 Juni 2023.

***Mulai menjabat sejak 16 Maret 2023 dan mendapat pernyataan efektif dari OJK terhitung sejak tanggal 07 Juni 2023.

**** Mulai menjabat sejak 16 Maret 2023 dan mendapat pernyataan efektif dari OJK sejak tanggal 26 Juli 2023.

Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris

Kebijakan keberagaman Dewan Komisaris belum mengatur secara khusus tentang keberagaman jenis kelamin (*gender*). Hal ini dikarenakan bahwa Perseroan lebih menekankan pada profesionalisme tanpa memandang gender. Keberagaman komposisi Dewan Komisaris berdasarkan usia, jenis kelamin, pendidikan, pengalaman kerja serta keahlian dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris

Nama	Jabatan	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan	Pengalaman Kerja	Keahlian
Chandra M. Hamzah	Komisaris Utama/ Independen	56 Tahun	Laki-laki	Sarjana (S1) Hukum	Memiliki pengalaman kerja pada Law Firm dan Komisi Pemberantasan Korupsi	Hukum, Keuangan dan <i>People Management</i>
Iqbal Latanro	Wakil Komisaris Utama/ Independen	65 Tahun	Laki-laki	Sarjana (S1) Ekonomi Magister (S2) Manajemen Bisnis	Memiliki pengalaman kerja pada Jasa Keuangan dan Jasa Pemeringkat Efek	Perbankan, Kepatuhan, Manajemen Risiko, dan <i>People Management</i>
Armand B. Arief	Komisaris Independen	71 Tahun	Laki-laki	- Sarjana (S1) Ekonomi - Master (S2) Policy Economics	Memiliki pengalaman kerja pada Jasa Keuangan dan Regulator Keuangan	Perbankan, Manajemen, Risiko, Manajemen Bisnis, dan <i>People Management</i>
Ahdi Jumphari Luddin*	Komisaris Independen	69 Tahun	Laki-laki	- Sarjana (S1) Ekonomi - Master (S2) Policy Economics	Memiliki pengalaman kerja pada Jasa Keuangan dan Regulator Keuangan	Perbankan, Kepatuhan Manajemen Risiko
Sentot A. Sentausa	Komisaris Independen	66 Tahun	Laki-laki	- Sarjana (S1) Statistika - Master (S2) Business Administration	Memiliki pengalaman kerja pada Jasa Keuangan	Perbankan, Kepatuhan Manajemen Risiko

Nama	Jabatan	Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan	Pengalaman Kerja	Keahlian
Andin Hadiyanto	Komisaris	58 Tahun	Laki-laki	- Sarjana (S1) Ekonomi - Master (S2) <i>International Development</i> - Doktor (S3) <i>International Development</i>	Memiliki pengalaman kerja pada Kementerian Keuangan RI, Kementerian Perdagangan, World Bank Asian Infrastruktur Investment Bank (AIIB) dan AMRO	Keuangan dan Ekonomi Makro
Herry Trisaputra Zuna	Komisaris	56 Tahun	Laki-laki	- Sarjana (S1) Teknik Sipil - Sarjana (S1) Manajemen - Magister (S2) Sistem dan Teknik Jalan Raya - Doktor (S3) Teknik Sipil	Memiliki pengalaman kerja pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Ekonomi Makro, Manajemen, Pekerjaan Umum dan Perumahan
Himawan Arief Sugoto	Komisaris	60 Tahun	Laki-laki	- Sarjana (S1) Teknik Sipil - Magister (S2) Teknik Sipil - Doktor (S3) Manajemen dan Bisnis	Memiliki pengalaman kerja pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	Manajemen dan Bisnis, Manajemen Risiko, Keuangan, Agraria dan Tata Ruang
Mohamad Yusuf Permana**	Komisaris	48 Tahun	Laki-laki	Sarjana (S1) Ekonomi	Memiliki pengalaman kerja pada Kementerian Sekretariat Negara dan perusahaan BUMN	Ekonomi

* Berhenti masa jabatan karena meninggal dunia tanggal 12 Agustus 2023.

** Diangkat berdasarkan RUPSLB tanggal 11 Januari 2023 dan efektif sejak 07 Juni 2023.

Transparansi Kepemilikan Saham Direksi dan Dewan Komisaris

Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris

Direksi dan Dewan Komisaris telah mengungkapkan kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya yang mencapai 5% atau lebih baik pada Perseroan maupun perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri. Untuk kepemilikan saham sampai dengan 31 Desember 2023, Direksi dan Dewan Komisaris tidak memiliki saham dengan jumlah kepemilikan mencapai 5% atau lebih, baik pada Perseroan maupun Perusahaan lainnya.

Kepemilikan Saham Direksi Sebesar 5% atau Lebih

Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham (lembar)			
		Bank BTN	Bank Lain	Lembaga Keuangan Non-Bank	Perusahaan Lain
Haru Koesmahargo*	Direktur Utama	-	-	-	-
Nixon L.P. Napitupulu**	Direktur Utama	-	-	-	-
Oni Febriarto Rahardjo***	Wakil Direktur Utama	-	-	-	-
Andi Nirwoto	Direktur IT and Digital	-	-	-	-

Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham (lembar)			
		Bank BTN	Bank Lain	Lembaga Keuangan Non-Bank	Perusahaan Lain
Elisabeth Novie Riswanti	Direktur Assets Management	-	-	-	-
Jasmin	Direktur Distribution and Funding	-	-	-	-
Setiyo Wibowo	Direktur Risk Management	-	-	-	-
Hirwandi Gafar	Direktur Consumer	-	-	-	-
Nofry Rony Poetra	Direktur Finance	-	-	-	-
Eko Waluyo	Direktur Human Capital, Compliance, and Legal	-	-	-	-
Hakim Putratama****	Direktur Institutional Banking	-	-	-	-

*Berhenti menjabat sejak 16 Maret 2023 berdasarkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun 2023.

** Pengalihan penugasan semula sebagai Wakil Direktur Utama menjadi Direktur Utama sejak 16 Maret 2023 dan mendapat pernyataan efektif dari OJK terhitung sejak tanggal 07 Juni 2023.

***Mulai menjabat sejak 16 Maret 2023 dan mendapat pernyataan efektif dari OJK terhitung sejak tanggal 07 Juni 2023.

**** Mulai menjabat sejak 16 Maret 2023 dan mendapat pernyataan efektif dari OJK sejak tanggal 26 Juli 2023.

Kepemilikan Saham Dewan Komisaris Sebesar 5% atau Lebih

Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham (lembar)			
		Bank BTN	Bank Lain	Lembaga Keuangan Non-Bank	Perusahaan Lain
Chandra M. Hamzah	Komisaris Utama/ Independen	-	-	-	-
Iqbal Latanro	Wakil Komisaris Utama/ Independen	-	-	-	-
Armand B. Arief	Komisaris Independen	-	-	-	-
Ahdi Jumhari Luddin*	Komisaris Independen	-	-	-	-
Sentot A. Sentausa	Komisaris Independen	-	-	-	-
Andin Hadiyanto	Komisaris	-	-	-	-
Herry Trisaputra Zuna	Komisaris	-	-	-	-
Himawan Arief Sugoto	Komisaris	-	-	-	-
Mohamad Yusuf Permana**	Komisaris	-	-	-	-

*Berhenti masa jabatan karena meninggal dunia tanggal 12 Agustus 2023.

**Diangkat berdasarkan RUPSLB tanggal 11 Januari 2023 dan efektif sejak 07 Juni 2023.

Transaksi Kepemilikan Saham Direksi dan Dewan Komisaris

Transaksi kepemilikan saham Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan termasuk pada penyampaian laporan kepada Regulator mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.04/2017 Tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka, Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. KEP-00066/BEI/09-2022 Tentang Perubahan Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, dan Anggaran Dasar Perseroan. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris wajib menyampaikan informasi kepada Perseroan melalui Sekretaris Perusahaan mengenai kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham Perseroan paling lambat 3 (tiga) hari kerja serta menyampaikan kepada OJK atas kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham Perusahaan Terbuka (dhi.BBTN) baik langsung maupun tidak langsung. Laporan wajib disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak terjadinya kepemilikan atau perubahan kepemilikan atas saham Perusahaan Terbuka.

Adapun transaksi kepemilikan saham Direksi dan Dewan Komisaris selama tahun 2023 adalah sebagai berikut.

No.	Nama	Kategori	Tanggal Transaksi	Jumlah Saham dan Presentase Kepemilikan Saham				Jumlah Saham yang Dibeli	Harga Pembelian per Saham	Status Kepemilikan	Tujuan Transaksi
				Sebelum transaksi		Setelah transaksi					
1.	Nixon L.P. Napitupulu	Direksi	13 Juli 2023	3.236.500	4.250.500	1.014.000	1.310	Langsung	Pemenuhan POJK 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum	Langsung	Penerimaan Penghargaan Jangka Panjang (<i>Long Term Incentive</i>) dalam bentuk saham
2.	Andi Nirwoto	Direksi	13 Juli 2023	859.161	1.822.161	963.000	1.310	Langsung	Pemenuhan POJK 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum	Langsung	Penerimaan Penghargaan Jangka Panjang (<i>Long Term Incentive</i>) dalam bentuk saham
3.	Elisabeth Novie Riswanti	Direksi	13 Juli 2023	770.200	1.733.200	963.000	1.310	Langsung	Pemenuhan POJK 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum	Langsung	Penerimaan Penghargaan Jangka Panjang (<i>Long Term Incentive</i>) dalam bentuk saham
4.	Jasmin	Direksi	13 Juli 2023	1.885.030	2.848.030	963.000	1.310	Langsung	Pemenuhan POJK 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum	Langsung	Penerimaan Penghargaan Jangka Panjang (<i>Long Term Incentive</i>) dalam bentuk saham
5.	Setiyo Wibowo	Direksi	13 Juli 2023	929.700	1.892.700	963.000	1.310	Langsung	Pemenuhan POJK 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam 7. Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum	Langsung	Penerimaan Penghargaan Jangka Panjang (<i>Long Term Incentive</i>) dalam bentuk saham

No.	Nama	Kategori	Tanggal Transaksi	Jumlah Saham dan Presentase Kepemilikan Saham				Jumlah Saham yang Dibeli	Harga Pembelian per Saham	Status Kepemilikan	Tujuan Transaksi
				Sebelum transaksi		Setelah transaksi					
6.	Hirwandi Gafar	Direksi	13 Juli 2023	800.314	1.763.314	800.314	1.310	Langsung	Pemenuhan POJK 45/ POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum	Langsung	Penerimaan Penghargaan Jangka Panjang (<i>Long Term Incentive</i>) dalam bentuk saham
7.	Nofry Rony Poetra	Direksi	13 Juli 2023	1.568.022	2.531.022	963.000	1.310	Langsung	Pemenuhan POJK 45/ POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum	Langsung	Penerimaan Penghargaan Jangka Panjang (<i>Long Term Incentive</i>) dalam bentuk saham
8.	Eko Waluyo	Direksi	13 Juli 2023	908.964	1.871.964	963.000	1.310	Langsung	Pemenuhan POJK 45/ POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum	Langsung	Penerimaan Penghargaan Jangka Panjang (<i>Long Term Incentive</i>) dalam bentuk saham
9.	Himawan Arief Sugoto	Dewan Komisaris	13 Juli 2023	0	404.600	404.600	1.310	Langsung	Pemenuhan POJK 45/ POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum	Langsung	Penerimaan Penghargaan Jangka Panjang (<i>Long Term Incentive</i>) dalam bentuk saham
10.	Herry Trisaputra Zuna	Dewan Komisaris	13 Juli 2023	0	404.600	404.600	1.310	Langsung	Pemenuhan POJK 45/ POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum	Langsung	Penerimaan Penghargaan Jangka Panjang (<i>Long Term Incentive</i>) dalam bentuk saham

Organ dan Komite di Bawah Dewan Komisaris

Sekretaris Dewan Komisaris

Sekretaris Dewan Komisaris Perseroan diangkat oleh Dewan Komisaris dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Tanggung jawab Sekretaris Dewan Komisaris antara lain mengatur berkaitan administrasi, membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja Perusahaan yang efektif dan memastikan bahwa Dewan Komisaris telah menjalankan prinsip-prinsip GCG dengan baik.

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Dewan Komisaris

Tugas dan tanggung jawab selaku Sekretaris Dewan Komisaris sesuai peraturan Menteri BUMN tersebut adalah melakukan kegiatan untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya berupa:

1. Mempersiapkan rapat, termasuk bahan rapat (*briefing sheet*) Dewan Komisaris,
2. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris sesuai ketentuan anggaran dasar:
3. Mengadministrasikan dokumen Dewan Komisaris, baik surat masuk, surat keluar, risalah rapat, maupun dokumen lainnya,
4. Menyusun rancangan rencana kerja dan anggaran Dewan Komisaris,
5. Menyusun rancangan laporan-laporan Dewan Komisaris,
6. Melaksanakan tugas lain dari Dewan Komisaris.

Profil Sekretaris Dewan Komisaris

Berikut profil ringkas Sekretaris Dewan Komisaris Perseroan.



FAHRUDIN

Sekretaris Dewan Komisaris

Warga Negara Indonesia, berusia 40 Tahun, berdomisili di Kota Jakarta Pusat.



Riwayat Pendidikan

- Sarjana Akuntansi Universitas Indonesia (2009)
- Magister Akuntansi Universitas Gadjah Mada (2012)



Pengalaman Kerja

- Sekretaris Dewan Komisaris PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (April 2016-Juli 2017);
- Sekretaris Dewan Komisaris PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (Juli 2017–Oktober 2019);
- Sekretaris Dewan Pengawas Perum BULOG (November 2019 - Oktober 2022)
- Penata Kelola Perusahaan Negara Muda pada Asisten Deputi Bidang TJSL, Kementerian BUMN (November 2021 - September 2023)
- Penata Kelola Perusahaan Negara Madya pada Asisten Deputi Bidang TJSL, Kementerian BUMN (Oktober 2023 - saat ini)
- Sekretaris Dewan Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (November 2022 - saat ini).



Periode Menjabat

01 November 2022 - 31 Oktober 2025 (Periode I)



Dasar Hukum Pengangkatan

Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 06/KOM/BTN/2022 Tanggal 28 September 2022



Jabatan Rangkap

Penata Kelola Perusahaan Negara Madya pada Asisten Deputi Bidang TJSL, Kementerian BUMN

Pengembangan Kompetensi Sekretaris Dewan Komisaris

Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
BTN Leadership Forum 2023	12 -13 Mei 2023 di Padma Hotel Semarang	PwC dan Korn Ferry
ESG Fundamentals	12 s.d. 14 Juli 2023 di Bandung	CRMS Indonesia
Peluang Perdagangan Karbon dalam Upaya Dekarbonisasi	27 Juli 2023 melalui Zoom Meeting	OJK Institute
Webinar Efektivitas Digital Maturity Assessment Dalam Mengukur Kematangan Transformasi Digital Perbankan	28 - 28 Agustus 2023 melalui Zoom Meeting	FKDKP
Board of Commissioner Forum 2023	15 - 16 September 2023 di Ayana Hotel Labuan Bajo, NTT	LPPI
Result-Focused Project Design and Monitoring	20 Juni 2023 di Mandiri University, Jakarta	ADB & Mandiri University
How To Manage Climate Related Risk in Banking Industry	22 Juni 2023 melalui Zoom Meeting	OJK Institute
Managing for Development Results	3 Oktober 2023 di PLN University, Jakarta	ADB & PLN University
GRC Integrated Information for Supervisory Board	5 Oktober 2023 melalui Zoom Meeting	BUMN University

Pelaksanaan Tugas Sekretaris Dewan Komisaris

Sekretaris Dewan Komisaris telah melaksanakan kegiatan antara lain sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan kegiatan administrasi kesekretariatan di lingkungan Dewan Komisaris.
2. Menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris dan pertemuan antara Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham, Direksi, maupun pihak-pihak pemangku kepentingan lainnya, termasuk penyiapan undangan rapat, penyiapan bahan-bahan rapat, dan penyusunan risalah rapat Dewan Komisaris, termasuk risalah rapat Dewan Komisaris bersama Direksi.
3. Menyampaikan asli risalah rapat Dewan Komisaris kepada Perseroan.
4. Menyusun rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris.
5. Menyusun rancangan laporan-laporan Dewan Komisaris.
6. Memastikan bahwa Dewan Komisaris mematuhi peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
7. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Komisaris secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta.
8. Mengoordinasikan anggota Komite, jika diperlukan, dalam rangka memperlancar tugas Dewan Komisaris.
9. Bertindak sebagai penghubung (*liaison officer*) Dewan Komisaris dengan pihak lain
10. Mengumpulkan data, laporan, dan/atau informasi yang relevan dengan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris.

Komite Audit

Perseroan membentuk Komite Audit dalam rangka mendukung Dewan Komisaris melaksanakan fungsi pengawasan antara lain memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan sistem pengendalian internal, menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Audit Intern maupun auditor ekstern, menelaah informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh Bank, dan menelaah ketaatan terhadap ketentuan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.

Dasar Pembentukan Komite Audit

Dasar pembentukan Komite Audit berdasarkan pada peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola Dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.
2. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.
3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK.03/2019 tanggal 28 Januari 2019 Tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum.

7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Bank Umum.
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan.
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
10. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 35/SEOJK.03/2017 tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum.
11. Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana Akta Pernyataan Keputusan RUPS Tahunan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Nomor 28 Tanggal 28 Maret 2023.
12. Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 05/KOM/ BTN/2023 tanggal 13 Desember 2023 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit melakukan tugas dan tanggung jawab antara lain:

A. Audit Intern dan Ekstern

1. Membantu Dewan Komisaris untuk memastikan efektivitas sistem pengendalian intern;
2. Memantau, mengkaji dan menilai efektivitas pelaksanaan Audit Intern dan Audit Ekstern, termasuk pengelolaan WBS.
3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait: pengangkatan dan pemberhentian Kepala Satuan Kerja Audit Intern, dan pemberian remunerasi tahunan Satuan Kerja Audit Intern secara keseluruhan serta penghargaan kinerja.
4. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan audit, pelaksanaan audit dan pemantauan tindak lanjut hasil audit, untuk menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS/Menteri.
5. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penyusunan rencana audit, ruang lingkup, dan anggaran Satuan Kerja Audit Intern.
6. Memastikan Satuan Kerja Audit Intern melakukan komunikasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Unit Usaha Syariah, Auditor Eksternal dan Otoritas Jasa Keuangan.
7. Meninjau dan mengevaluasi laporan auditor internal secara berkala, merekomendasikan dan memastikan Direksi mengambil tindakan perbaikan untuk mengatasi kelemahan pengendalian, kecurangan (*fraud*), masalah kepatuhan terhadap kebijakan dan peraturan perundang-undangan atau masalah lain yang diidentifikasi dan dilaporkan oleh Satuan Kerja Audit Intern.
8. Mengevaluasi kinerja Satuan Kerja Audit Intern.

9. Memastikan objektivitas dan independensi auditor internal dan Auditor Eksternal.
10. Memastikan Satuan Kerja Audit Intern menjunjung tinggi integritas dalam pelaksanaan tugas.
11. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal dan eksternal.
12. Memberi rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas penerbitan Piagam Audit Intern.
13. Memberi rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas penunjukan pengendali mutu independen dari pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang terhadap kinerja SKAI.
14. Melakukan pemantauan dan evaluasi yang digunakan untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris paling sedikit terhadap:
 - Pelaksanaan tugas satuan kerja audit intern.
 - Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi keuangan.
 - Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan satuan kerja audit intern Bank, auditor ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas dan lembaga lain.

B. Pelaporan Keuangan

1. Melakukan proses pengadaan calon kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa bank, dan apabila diperlukan dapat meminta bantuan Direksi dalam proses pengadaannya.
2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan/Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa.
3. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan tahunan yang dilakukan oleh Akuntan/Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik.
4. Memantau dan mengkaji proses pelaporan keuangan yang diaudit oleh Auditor Eksternal.
5. Memastikan kredibilitas dan objektivitas laporan keuangan Bank yang akan diterbitkan untuk pihak eksternal dan badan pengawas, termasuk penindaklanjutan keluhan dan/atau catatan ketidakwajaran terhadap laporan selama periode pengkajian Komite Audit.
6. Melakukan pemantauan dan evaluasi yang digunakan untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi keuangan.
7. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan bank kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan bank.
8. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya.
9. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan bank.

C. Lain-lain

1. Memberikan evaluasi/rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan, penunjukan kembali dan pemberhentian Perusahaan Pemeriklat *Rating* untuk melakukan Penilaian Tingkat Kesehatan (*Rating* Perusahaan) yang didasarkan kepada independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa.
2. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya.
3. Memastikan telah terdapat prosedur evaluasi yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan bank.
4. Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris serta tugas-tugas Dewan Komisaris lainnya.
5. Melakukan tugas terkait pengelolaan risiko sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
6. Menjalankan wewenang, tugas, dan tanggung jawab lain yang terkait dengan fungsinya.
7. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan bank.

8. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan bank.
9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi bank.
10. Melakukan tugas lainnya dari Dewan Komisaris sesuai dengan bidang tugas Komite Audit.

Piagam Komite Audit

Komite Audit memiliki Piagam Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Bank BTN nomor 06/KOM/ BTN/2023 tanggal 13 Desember 2023 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Pedoman dan Tata Tertib Kerja atau Piagam Komite Audit menjadi acuan Komite Audit dalam melaksanakan tugasnya secara efektif. Piagam Komite Audit dibuat dengan tujuan untuk menjadi dasar dan pedoman bagi Komite Audit dalam melaksanakan tugasnya antara lain memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan sistem pengendalian internal, menilai pelaksanaan kegiatan hasil audit yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Audit Intern maupun auditor eksternal, menelaah informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan menelaah ketaatan terhadap ketentuan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.

Isi Pedoman dan Tata Tertib Kerja (Piagam) Komite Audit antara lain:

Bagian I	Ketentuan Umum, Tujuan Pembentukan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit	Pasal 1	Ketentuan Umum
		Pasal 2	Pengertian, Maksud, dan Tujuan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit
Bagian II	Tugas dan Tanggung Jawab serta Wewenang Komite Audit	Pasal 3	Tugas dan Wewenang Komite Audit
		Pasal 4	Kewajiban Komite Audit
Bagian III	Tata Cara, Prosedur Kerja, Akses dan Kerahasiaan Informasi, Komposisi, Struktur dan Persyaratan Anggota	Pasal 5	Tata Cara dan Prosedur Kerja Komite Audit
		Pasal 6	Akses dan Kerahasiaan Informasi
		Pasal 7	Struktur, Pengangkatan, dan Pemberhentian Komite Audit
		Pasal 8	Persyaratan Keanggotaan Komite Audit
Bagian IV	Rapat, Pelaporan, Rencana Kerja, Penganggaran, Penghasilan dan Masa Tugas Komite Audit	Pasal 9	Rapat Komite Audit
		Pasal 10	Pelaporan Komite Audit
		Pasal 11	Rencana Kerja dan Anggaran Komite Audit
		Pasal 12	Penghasilan Anggota Komite
		Pasal 13	Masa Tugas
Bagian V	Pendidikan, Tenaga Penunjang dan Penanganan Pengaduan	Pasal 14	Peningkatan Profesionalisme Anggota Komite Audit dan Penggunaan Tenaga Penunjang
		Pasal 15	Penanganan Pengaduan atau Pelaporan atas Dugaan Pelanggaran Terkait Laporan Keuangan
Bagian VI	Evaluasi & Penutup	Pasal 16	Evaluasi
		Pasal 17	Penutup

Wewenang Komite Audit

Komite Audit diberikan kewenangan oleh Dewan Komisaris untuk:

1. Mengakses dokumen, data dan informasi Bank tentang pegawai, dana, *asset* dan sumber daya Bank yang diperlukan.
2. Berkomunikasi langsung dengan pegawai termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko dan akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.
3. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugas (jika diperlukan).
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Masa Tugas Komite Audit

Masa tugas anggota Komite Audit yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama 2 (dua) tahun masa tugas, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Audit

Komite Audit dibentuk oleh Dewan Komisaris yang keanggotaannya terdiri dari ketua dan anggota dan wajib seluruhnya independen. Komite Audit paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dari Pihak dan luar Perseroan.

Keanggotaan Komite Audit paling kurang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen yang merangkap sebagai Ketua, 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan/akuntansi, dan 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang hukum/perbankan.

Ketua dan anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris. Ketua Komite Audit adalah Komisaris Independen atau anggota Dewan Komisaris yang dapat bertindak independen. Anggota Komite Audit dapat berasal dari anggota Dewan Komisaris atau dari luar Perseroan.

Adapun struktur, keanggotaan dan keahlian Komite Audit dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel Struktur, Keanggotaan, dan Keahlian Komite Audit

Nama	Jabatan	Keahlian	Keterangan	Dasar Pengangkatan
Iqbal Latanro	Ketua	Perbankan, Kepatuhan Manajemen Risiko dan <i>People Management</i>	Wakil Komisaris Utama/ Independen	Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 01/KOM/BTN/2021 tanggal 24 Maret 2021
Ahdi Jumhari Luddin ¹	Anggota	Perbankan, Kepatuhan dan Manajemen Risiko	Komisaris Independen	Surat Dewan Komisaris Nomor 03/KOM/BTN/I/2020 tanggal 8 Januari 2020
Sentot A. Sentausa	Anggota	Perbankan, Kepatuhan, Manajemen Risiko dan Bisnis Administrasi	Komisaris Independen	Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 03/KOM/BTN/2022 tanggal 17 Maret 2022
Andin Hadiyanto	Anggota	Perbankan, Kepatuhan, Manajemen Risiko dan Bisnis Administrasi	Komisaris	Surat Dewan Komisaris Nomor 03/KOM/BTN/I/2020 tanggal 8 Januari 2020
Adi Prakoso ²	Anggota	Audit, Perbankan dan Akuntansi	Pihak Independen	Keputusan Direksi Nomor 271/DIR/2021 Tanggal 15 Maret 2021
Peter Eko Budi Darwito	Anggota	Audit, Perbankan, Perbankan Syariah dan Keuangan	Pihak Independen	Keputusan Direksi Nomor 1088/DIR/2022 tanggal 09 November 2022
Endang A. Suprijatna ³	Anggota	Audit, Perbankan, Perbankan Syariah dan Akuntansi	Pihak Independen	Keputusan Direksi Nomor 167/DIR/2023 Tanggal 8 Maret 2023

1) Ditetapkan sebagai anggota Komite Audit pada tanggal 8 Januari 2020, efektif pada tanggal 16 Maret 2020. Masa jabatan sebagai anggota Komite Audit berakhir dengan sendirinya dikarenakan meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2023.

2) Ditetapkan sebagai anggota Komite Audit pada tanggal 13 Maret 2018 sampai dengan 12 Maret 2023.

3) Ditetapkan sebagai anggota Komite Audit pada tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan 12 Maret 2026.

Profil Komite Audit

Profil Komite Audit per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut.

IQBAL LATANRO Ketua Komite Audit	Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris. Periode menjabat beliau sebagai Ketua merangkap anggota Komite Audit dari 24 Maret 2021 - 23 Maret 2026	ANDIN HADIYANTO Anggota Komite Audit	Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris. Periode menjabat beliau sebagai anggota Komite Audit dari 27 November 2019 - 26 November 2024
SENTOT A. SENTAUSA Anggota Komite Audit	Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris. Periode menjabat beliau sebagai anggota Komite Audit dari 02 Maret 2022 - 16 Maret 2027		



PETER EKO BUDI DARWITO

Anggota Komite Audit

Warga Negara Indonesia, berusia 59 Tahun, berdomisili di Tangerang, Banten.



Riwayat Pendidikan

- Magister Agribisnis Jurusan Magister Manajemen, IPB Bogor (2000)
- Sarjana Pertanian Jurusan Budidaya Pertanian, Universitas Sebelas Maret Surakarta (1987)



Pengalaman Kerja

- Inspektur/Kepala Audit Internal Wilayah BRI Jayapura (2018 – Juli 2019)
- Wakil Pemimpin BRI Kantor Cabang Khusus (2015-2018)
- *Group Head/Kabag* Kredit BRI Kantor Cabang Khusus (2009-2014)
- *Group Head/Kabag* Kredit Program Kantor Pusat BRI (2005-2008)
- *Senior Account Officer* Bisnis Kredit Komersial Kantor Pusat BRI (1999-2005)
- *Account officer* s.d. Asisten Manager Kredit Bisnis Pertanian, Kredit Komersial & Kredit Korporasi BRI Kantor Cabang Khusus (1990-1998)



Periode dan Masa Jabatan

Periode pertama masa jabatan 19 November 2019 - 18 November 2022

Periode kedua masa jabatan 19 November 2022 - 18 November 2024



Dasar Hukum Pengangkatan

Keputusan Direksi Nomor 1088/DIR/2022 tanggal 09 November 2022 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Anggota Komite Audit



Jabatan Rangkap

Tidak memiliki rangkap jabatan



Sertifikasi

- Certification in Audit Committee Practices (CACP) dari IKAI
- Sertifikasi Manajemen Risiko Level 3 dari LSPI BARA



ENDANG A. SUPRIJATNA

Anggota Komite Audit

Warga Negara Indonesia, berusia 56 Tahun,
berdomisili di Bekasi, Jawa Barat.



Riwayat Pendidikan

Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi, Universitas Padjajaran (1991)



Pengalaman Kerja

- Regional Business Control Head (Kepala Internal Audit) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Wilayah VI Jawa Barat, Wilayah VIII Jawa Timur dan Wilayah V Jakarta Selatan termasuk Bogor (2015-Januari 2023)
- Consumer Loans Business Center Manager Wilayah Makassar, Palu, Kendari, Ambon, Wilayah Samarinda & Bontang, Wilayah Lampung (November 2009-2014)
- Team Leader Audit Kredit Small, Micro & Consumer PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2006 – Oktober 2009)
- Team Leader Audit Ditribusion (Cabang) PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (2005)
- Team Leader Audit Kredit Wholesale Banking PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Agustus 2001 - 2004)
- Senior Auditor General Audit PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Juli 1999-2001)
- Auditor PT Bank Ekspor Impor Indonesia (Persero) (Desember 1993-1999)



Periode dan Masa Jabatan

Periode pertama masa jabatan 13 Maret 2023 - 12 Maret 2024



Dasar Hukum Pengangkatan

Keputusan Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Nomor 167/DIR/2023 Tanggal 8 Maret 2023 tentang Penetapan Sdr. Endang A. Suprijatna sebagai Anggota Komite Audit.



Jabatan Rangkap

Tidak memiliki rangkap jabatan



Sertifikasi

- *Certification in Audit Committee Practices* (CACP) dari IKAI
- *Qualified Internal Auditor* dari Dewan Sertifikasi *Qualified Internal Auditor*
- Sertifikasi Kompetensi sebagai Audit Supervisor dari Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)
- Sertifikasi Risk Management Level 3 dari Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)

Independensi Komite Audit

Tabel Independensi Komite Audit

Aspek Independensi	Iqbal Latanro	Ahdi Jumhari Luddin	Sentot A. Sentausa	Andin Hadiyanto	Adi Prakoso	Peter Eko Budi Darwito	Endang A. Suprijatna
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi	√	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi	√	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham lebih dari atau sama dengan 5% (lima persen) di Perseroan.	√	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Audit	√	√	√	√	√	√	√
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah	√	√	√	√	√	√	√

Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Komite Audit Pada Tahun 2023

Nama	Jabatan	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
Iqbal Latanro	Ketua	Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris		
Ahdi Jumhari Luddin ¹	Anggota	Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris		
Sentot A. Sentausa	Anggota	Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris		
Andin Hadiyanto	Anggota	Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris		
Adi Prakoso ²	Anggota	-	-	-
Peter Eko Budi Darwito	Anggota	Seminar Seminar Nasional Internal Audit : <i>Trusted Advisor Navigating The New Fronting, Connecting Between Information Technology and Business Strategy</i>	6-7 Desember 2023 Bali	YPIA
		<i>How to Drive Corporate Performance Through Accounting Practices</i>	Webinar Jakarta 9 November 2023	OJK Institute
		Seminar The7th Indonesia Risk Management Outlook 2024 (IRMO 2024)	Jakarta 27 Oktober 2024	LPPI
		<i>CG Methodology and Environmental and Social Management System</i>	Webinar Jakarta 25 Oktober 2023	BUMN School of Excellence
		<i>Workshop Islamic Banking For Executive</i>	Jakarta 19 Oktober 2023	Pusat Ekonomi & Bisnis Syariah FEB UI & BTN
		<i>ESG for Boards – Governance for ESG</i>	Webinar Jakarta 27 September 2023	BUMN School of Excellence
		<i>Board of Commissioner Forum 2023</i>	15 - 16 September 2023 di Ayana Hotel Waecicu Beach, Labuan Bajo, NTT	LPPI
		<i>Enhancing Financial Performance Through Data Analytics</i>	Webinar Jakarta 31 Agustus 2023	OJK Institute
		<i>BRMI – GRC Master Class – Peningkat & Penerbitan Efek Bersifat Utang & Sukuk (EBUS)</i>	Webinar Jakarta 10 Agustus 2023	BUMN Leadership Management Institute
		<i>Spesial Directorship Program</i>	Yogyakarta 26 - 27 Juli 2023	IICD
Endang A. Suprijatna ³	Anggota	<i>How to Manage Climate Related Risk in Banking Industry</i>	Webinar Jakarta 22 Juni 2023	OJK Institute
		Seminar Seminar Nasional Internal Audit : <i>Trusted Advisor Navigating The New Fronting, Connecting Between Information Technology and Business Strategy</i>	6 - 7 Desember 2023 Bali	YPIA
		Konferensi Nasional Komite Audit 2023 Mengawal Keberlanjutan dan Pertumbuhan Perseroan Melalui Pengawasan dan Pengendalian Risiko	19 Oktober 2023	IKAI
		<i>Board of Commissioner Forum 2023</i>	15 - 16 September 2023 di Ayana Hotel Waecicu Beach, Labuan Bajo, NTT	LPPI
		<i>Certification in Audit Committee Practices Review Course Batch XXXI</i>	25-27 Juli 2023	IKAI

1) Ditetapkan sebagai anggota Komite Audit pada tanggal 8 Januari 2020, efektif pada tanggal 16 Maret 2020. Masa jabatan sebagai anggota Komite Audit berakhir dengan sendirinya dikarenakan meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2023.

2) Ditetapkan sebagai anggota Komite Audit pada tanggal 13 Maret 2018 sampai dengan 12 Maret 2023.

3) Ditetapkan sebagai anggota Komite Audit pada tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan 12 Maret 2026.

Rapat Komite Audit

KEBIJAKAN RAPAT KOMITE AUDIT

1. Komite Audit mengadakan rapat sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan minimal rapat Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
2. Rapat Komite Audit dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh paling kurang 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota Komite Audit termasuk seorang Komisaris Independen dan Pihak Independen.
3. Dalam hal terdapat benturan kepentingan anggota Komite Audit dengan objek bahasan, maka anggota komite dimaksud wajib mendeklarasikan tentang adanya benturan kepentingan dan tidak mempunyai hak suara dalam pengambilan keputusan.
4. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite Audit atau anggota paling senior apabila Ketua Komite Audit berhalangan hadir.
5. Keputusan rapat Komite Audit dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
6. Dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
7. Setiap rapat Komite Audit harus dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan risalah didokumentasikan secara baik.
8. Risalah rapat sebagaimana dimaksud disampaikan secara tertulis oleh Komite Audit kepada Dewan Komisaris.
9. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat Komite Audit wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
10. Dalam hal anggota Komite Audit tidak dapat menghadiri rapat secara fisik, maka dapat menghadiri rapat dengan menggunakan:
 - a. Surat kuasa atau cara-cara lain yang diperbolehkan sesuai tata cara dan ketentuan perundangan yang berlaku atau;
 - b. Sarana media elektronik antara lain telekonferensi.
11. Kehadiran anggota Komite Audit dalam rapat, dilaporkan dalam laporan triwulan dan laporan tahunan Komite Audit.

AGENDA RAPAT KOMITE AUDIT

Sepanjang tahun 2023, tanggal pelaksanaan, agenda rapat dan peserta rapat Komite Audit, sebagai berikut.

No.	Tanggal	Agenda	Peserta Rapat
1	9 Januari 2023	Monitoring Perkembangan <i>Accrued Interest</i>	• Iqbal Latanro • Ahdi Jumhari Luddin • Andin Hadiyanto • Sentot A. Sentausa • Adi Prakoso • Peter Eko Budi Darwito
2	9 Januari 2023	Pengadaan Jasa Konsultan Pengendali Mutu Independen dari Pihak Ekstern untuk Melakukan Kaji Ulang terhadap Kinerja Internal Audit Division	• Iqbal Latanro • Ahdi Jumhari Luddin • Andin Hadiyanto • Sentot A. Sentausa • Adi Prakoso • Peter Eko Budi Darwito
3	16 Januari 2023	Konsep Persetujuan Piagam Audit Intern, Permintaan Data Debitur, Evaluasi terhadap Jasa KAP untuk Audit posisi 30 Juni 2022 dan Tindak Lanjut Rekomendasi BPK RI	• Iqbal Latanro • Ahdi Jumhari Luddin • Andin Hadiyanto • Sentot A. Sentausa • Adi Prakoso • Peter Eko Budi Darwito
4	25 Januari 2023	Rekomendasi Komite Audit dalam Penunjukan KAP Tahun Buku 2023	• Iqbal Latanro • Ahdi Jumhari Luddin • Andin Hadiyanto • Sentot A. Sentausa • Adi Prakoso • Peter Eko Budi Darwito
5	06 Februari 2023	Rekomendasi Persetujuan <i>Annual Audit Plan</i> 2023	• Iqbal Latanro • Ahdi Jumhari Luddin • Andin Hadiyanto • Sentot A. Sentausa • Adi Prakoso • Peter Eko Budi Darwito
6	10 Februari 2023	<i>Closing Meeting</i> Hasil Audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2022 dengan KAP	• Iqbal Latanro • Ahdi Jumhari Luddin • Andin Hadiyanto • Sentot A. Sentausa • Adi Prakoso • Peter Eko Budi Darwito

No.	Tanggal	Agenda	Peserta Rapat
7	15 Februari 2023	Persetujuan atas <i>Draft</i> Laporan Keuangan Publikasi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Triwulan IV 2022 (<i>Audited</i>)	• Iqbal Latanro • Ahdi Jumhari Luddin • Andin Hadiyanto • Sentot A. Sentausa • Adi Prakoso • Peter Eko Budi Darwito
8	27 Februari 2023	1. Pokok-pokok Audit dan <i>Monitoring</i> Tindak Lanjut Audit Umum 2. Laporan <i>Monitoring</i> WBS dan Tindak Lanjut Audit Khusus 3. Tindak Lanjut Audit BPK dan Progres Audit BPK 2023	• Iqbal Latanro • Ahdi Jumhari Luddin • Sentot A. Sentausa • Adi Prakoso • Peter Eko Budi Darwito
9	6 Maret 2023	Keterlambatan koreksi pelaporan SLIK, Tindak lanjut temuan OJK pada UUS dan Progres pemisahan Unit Usaha Syariah Bank BTN	• Iqbal Latanro • Ahdi Jumhari Luddin • Sentot A. Sentausa • Adi Prakoso • Peter Eko Budi Darwito
10	20 Maret 2023	- <i>Management Letter</i> Kantor Akuntan Publik untuk Tahun Buku 31 Desember 2022 - Evaluasi atas Kinerja Jasa Penunjang (Kantor Akuntan Publik)	• Iqbal Latanro • Andin Hadiyanto • Sentot A. Sentausa • Endang A. Suprijatna • Peter Eko Budi Darwito
11	10 April 2023	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit atas Informasi Keuangan per 31 Desember 2022 oleh KAP PSS-EY	• Iqbal Latanro • Andin Hadiyanto • Sentot A. Sentausa • Endang A. Suprijatna • Peter Eko Budi Darwito
12	13 April 2023	Hasil Telaah Komite Audit atas <i>Draft</i> Laporan Publikasi Keuangan per 31 Maret Tahun 2023 (tidak diaudit)	• Iqbal Latanro • Andin Hadiyanto • Sentot A. Sentausa • Endang A. Suprijatna • Peter Eko Budi Darwito
13	8 Mei 2023	Realisasi <i>Audit Plan</i> , Kegiatan IAD dan <i>Monitoring</i> TL Temuan s.d Triwulan I 2023	• Iqbal Latanro • Andin Hadiyanto • Sentot A. Sentausa • Endang A. Suprijatna • Peter Eko Budi Darwito
14	15 Mei 2023	Pembahasan Laporan Komite Audit Triwulan I Tahun 2023	• Iqbal Latanro • Andin Hadiyanto • Sentot A. Sentausa • Endang A. Suprijatna • Peter Eko Budi Darwito
15	5 Juni 2023	1. Pembahasan Hasil <i>Due Diligence</i> Dana Pensiun 2. Proses Putusan dan Eksekusi Sanksi Disiplin Pegawai.	• Iqbal Latanro • Ahdi Jumhari Luddin • Andin Hadiyanto • Sentot A. Sentausa • Endang A. Suprijatna • Peter Eko Budi Darwito
16	5 Juni 2023	Rekomendasi Persetujuan Ranking I/Pemenang Pengadaan Jasa Konsultan Pengendali Mutu Independen dari Pihak Ekstern untuk Melakukan Kaji Ulang terhadap Kinerja Internal Audit Division Periode Juli 2020 s.d. Juni 2023	• Iqbal Latanro • Ahdi Jumhari Luddin • Andin Hadiyanto • Sentot A. Sentausa • Endang A. Suprijatna • Peter Eko Budi Darwito
17	26 Juni 2023	Penyusunan <i>Self Assessment Good Corporate Governance</i> Semester I tahun 2023	• Iqbal Latanro • Andin Hadiyanto • Sentot A. Sentausa • Endang A. Suprijatna • Peter Eko Budi Darwito
18	3 Juli 2023	Pembahasan Hasil Audit Umum Internal Putaran I Tahun 2023 dan Audit Khusus	• Iqbal Latanro • Andin Hadiyanto • Sentot A. Sentausa • Endang A. Suprijatna • Peter Eko Budi Darwito

No.	Tanggal	Agenda	Peserta Rapat
19	17 Juli 2023	Telaah Laporan Keuangan Publikasi Triwulan II Tahun 2023	• Iqbal Latanro • Andin Hadiyanto • Sentot A. Sentausa • Endang A. Suprijatna • Peter Eko Budi Darwito
20	17 Juli 2023	Rootcause & Tindak Lanjut Temuan KAP 2022 & OJK 2022	• Iqbal Latanro • Andin Hadiyanto • Sentot A. Sentausa • Endang A. Suprijatna • Peter Eko Budi Darwito
21	24 Juli 2023	Monitoring Perkembangan Klaim Asuransi Jiwa Kredit & Perkembangan Bisnis dengan IFG	• Iqbal Latanro • Andin Hadiyanto • Sentot A. Sentausa • Endang A. Suprijatna • Peter Eko Budi Darwito
22	07 Agustus 2023	Hasil Kaji Ulang Fungsi Internal Audit Division oleh PwC	• Iqbal Latanro • Andin Hadiyanto • Sentot A. Sentausa • Endang A. Suprijatna • Peter Eko Budi Darwito
23	21 Agustus 2023	Hasil Exit Meeting Audit Internal dan Rencana Site Visit Komite Audit	• Iqbal Latanro • Andin Hadiyanto • Sentot A. Sentausa • Endang A. Suprijatna • Peter Eko Budi Darwito
24	28 Agustus 2023	Evaluasi Kinerja KAP Tahun Buku 2022	• Iqbal Latanro • Andin Hadiyanto • Sentot A. Sentausa • Endang A. Suprijatna • Peter Eko Budi Darwito
25	11 September 2023	Tindak Lanjut Surat OJK Nomor S-53 tanggal 25 Agustus 2023 dan Realisasi Annual Audit Plan tahun 2023	• Iqbal Latanro • Sentot A. Sentausa • Endang A. Suprijatna • Peter Eko Budi Darwito
26	02 Oktober 2023	Rekomendasi Penetapan KAP yang melakukan Limited Review per September 2023 dan Pengadaan Jasa Perusahaan Pemeringkat untuk melakukan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank	• Iqbal Latanro • Andin Hadiyanto • Sentot A. Sentausa • Endang A. Suprijatna • Peter Eko Budi Darwito
27	09 Oktober 2023	Penginian Piagam Audit Intern	• Iqbal Latanro • Andin Hadiyanto • Sentot A. Sentausa • Endang A. Suprijatna • Peter Eko Budi Darwito
28	13 November 2023	Perkembangan Accrued Interest dan Audit terkait Accrued Interest	• Iqbal Latanro • Andin Hadiyanto • Sentot A. Sentausa • Endang A. Suprijatna • Peter Eko Budi Darwito
29	13 November 2023	Permasalahan QRIS BTN as Issuer	• Iqbal Latanro • Andin Hadiyanto • Sentot A. Sentausa • Endang A. Suprijatna • Peter Eko Budi Darwito
30	20 November 2023	Pengisian Survei Evaluasi Pelaksanaan Audit Internal Tahun 2023	• Iqbal Latanro • Andin Hadiyanto • Sentot A. Sentausa • Endang A. Suprijatna • Peter Eko Budi Darwito
31	27 November 2023	Telaah Laporan Keuangan Publikasi Triwulan III Tahun 2023	• Iqbal Latanro • Andin Hadiyanto • Sentot A. Sentausa • Endang A. Suprijatna • Peter Eko Budi Darwito

No.	Tanggal	Agenda	Peserta Rapat
32	4 Desember 2023	Pembahasan Pengadaan Barang yang bersifat Substansi	• Iqbal Latanro • Andin Hadiyanto • Sentot A. Sentausa • Endang A. Suprijatna • Peter Eko Budi Darwito
33	4 Desember 2023	Perkembangan Tindak Lanjut Permasalahan Kredit Kring	• Iqbal Latanro • Sentot A. Sentausa • Endang A. Suprijatna • Peter Eko Budi Darwito
34	11 Desember 2023	Penginian Piagam Komite Audit	• Iqbal Latanro • Andin Hadiyanto • Sentot A. Sentausa • Endang A. Suprijatna • Peter Eko Budi Darwito
35	18 Desember 2023	Progres Pengadaan KAP Tahun Buku 2024 dan Program Kerja & KPI Komite Audit tahun 2024	• Iqbal Latanro • Andin Hadiyanto • Sentot A. Sentausa • Endang A. Suprijatna • Peter Eko Budi Darwito

FREKUENSI DAN TINGKAT KEHADIRAN RAPAT KOMITE AUDIT

Selama tahun 2023, Komite Audit telah melaksanakan rapat sebanyak 35 kali. Adapun frekuensi dan tingkat kehadiran rapat masing-masing anggota Komite Audit adalah sebagai berikut.

Tabel Tingkat Kehadiran Rapat Komite Audit

Nama	Jabatan	Rapat Komite Audit		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase (%)
Iqbal Latanro	Ketua	35	35	100
Ahdi Jumhari Luddin ¹	Anggota	11	11	100
Sentot A. Sentausa	Anggota	35	35	100
Andin Hadiyanto	Anggota	35	31	88,6
Adi Prakoso ²	Anggota	9	9	100
Peter Eko Budi Darwito	Anggota	35	35	100
Endang A. Suprijatna ³	Anggota	26	26	100

¹⁾ Ditetapkan sebagai anggota Komite Audit pada tanggal 8 Januari 2020, efektif pada tanggal 16 Maret 2020. Kehadiran Bpk. Ahdi Jumhari Luddin dalam rapat dikarenakan kondisi kesehatan hingga Ybs. meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2023.

²⁾ Ditetapkan sebagai anggota Komite Audit pada tanggal 13 Maret 2018 sampai dengan 12 Maret 2023.

³⁾ Ditetapkan sebagai anggota Komite Audit pada tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan 12 Maret 2026.

Program Kerja dan Pelaksanaan Tugas Komite Audit Tahun 2023

No	Kegiatan	Pelaksanaan	Keterangan
A. Kegiatan Rutin Komite Audit:			
1	Memberikan masukan dan rekomendasi Persetujuan atas <i>Annual Audit Plan</i> kepada Dewan Komisaris	Terlaksana	Pada awal tahun
2.	Pemantauan dan evaluasi bulanan terhadap pelaksanaan tugas & tindak lanjut Audit Internal, termasuk terhadap pengendalian internal	Terlaksana	Berkala bulanan
3	Menghadiri <i>Exit Meeting</i> Audit Umum IAD	Terlaksana	Terlaksana 5x
4	Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan audit oleh Eksternal Auditor (OJK, BI, BPK, KAP, dll) termasuk penyelesaian tindak lanjut hasil audit.	Terlaksana	Berkala triwulanan
5	Pengecekan dan evaluasi terhadap Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan	Terlaksana	TW IV 2022, TW I, TW II dan TW III 2023

No	Kegiatan	Pelaksanaan	Keterangan
6.	Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham	Terlaksana	KAP Tahun Buku 2023
7.	Menyampaikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Kementerian BUMN dalam rangka agenda Rapat Umum Pemegang Saham	Terlaksana	KAP Tahun Buku 2023
8.	Memantau laporan penunjukan Kantor Akuntan Publik sesuai Rapat Umum Pemegang Saham kepada OJK	Terlaksana	KAP Tahun Buku 2023
9.	Pemantauan progres pelaksanaan audit oleh KAP	Terlaksana	KAP Tahun Buku 2022
10.	Memberikan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian Jasa Audit atas Informasi Keuangan oleh KAP untuk disampaikan kepada OJK	Terlaksana	KAP Tahun Buku 2022
11.	Menyampaikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk memulai pengadaan terhadap pengendali mutu independen dari pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang terhadap kinerja SKAI	Terlaksana	Periode Juli 2020 s.d. Juni 2023
12.	Menyampaikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk pengendali mutu independen dari pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang terhadap kinerja SKAI	Terlaksana	KAP PwC
13.	Menelaah, mengevaluasi dan memberikan masukan kepada Dewan Komisaris terkait materi <i>performance review</i> bulanan yang disampaikan oleh Direksi	Terlaksana	Berkala bulanan
14.	Menyusun laporan triwulanan dan tahunan mengenai kegiatan Komite Audit kepada Dewan Komisaris	Terlaksana	Laporan TW IV 2022 & TW I 2023
15.	Menyusun Laporan Pengawasan Dewan Komisaris atas Realisasi RBB (Semesteran) untuk disampaikan kepada OJK	Terlaksana	Berkala semesteran
16.	Menyusun Tanggapan Dewan Komisaris atas Kinerja Perseroan (Triwulanan) yang disampaikan kepada Menteri BUMN	Terlaksana	Berkala triwulanan
17.	Penilaian pengisian Kertas Kerja <i>Self Assessment</i> GCG Semesteran Komite Audit & Dewan Komisaris	Terlaksana	Periode Semester I dan II 2023
18.	Menyusun Laporan Tahunan (<i>Annual Report</i>) terkait dengan Komite Audit dan Dewan Komisaris	Terlaksana	Annual Report 2022 & 2023
B. Kegiatan Insidental Komite Audit			
1.	Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Manajemen dan Akuntan Publik atas jasa yang diberikan	-	Belum ada perbedaan pendapat
2.	Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan bank.	-	Belum ada pengaduan
4.	Mendampingi anggota Dewan Komisaris dalam kunjungan kerja ke kantor-kantor BTN sesuai penugasan dari Dewan Komisaris	Terlaksana	Sumatera Utara dan Yogyakarta-Magelang
5.	Mengikuti <i>training</i> , seminar, workshop sesuai dengan penugasan oleh Dewan Komisaris dalam rangka Pengembangan Kompetensi yang berhubungan dengan Tugas dan Tanggung Jawab.	Terlaksana	Webinar OJK, GRC Marterclass KBUMN, SDP, CACP, SNIA
C. Lain-lain			
1.	Rapat Komite Audit	Terlaksana	35 kali
2.	Rapat Koordinasi dengan Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi	Terlaksana	4 kali
3.	Memberikan masukan terhadap konsep RKAP dan RBB	Terlaksana	Berkala semesteran

PERNYATAAN KOMITE AUDIT ATAS EFEKTIVITAS SPI

Sistem pengendalian internal yang dilakukan oleh Bank BTN secara umum telah berjalan dengan baik. Manajemen terus berupaya meningkatkan penerapan sistem pengendalian internal dengan mengacu pada laporan hasil audit internal dan eksternal.



Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris yang bertugas membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya. Komite Remunerasi dan Nominasi merupakan salah satu Organ Perseroan, bekerja sama dengan Satuan Kerja Manajemen dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai perangkat yang dimiliki Direksi untuk pengharkatan sumber daya manusia sebagai *strategic assets dan strategic partners*, menganalisis kebijakan, monitoring pelaksanaan mempersiapkan calon pemimpin yang akan datang yang memberikan contoh teladan serta perhatian yang seksama terhadap pelaksanaan Tata Kelola perusahaan yang baik, termasuk kebijakan dan besaran remunerasinya.

Dasar Pembentukan Komite Remunerasi dan Nominasi

Perseroan membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi berdasarkan pada Peraturan, Ketentuan dan Perundang-undangan sebagai berikut:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah.
2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tanggal 1 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/POJK.03/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum.
6. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/SEOJK.03/2016 tanggal 26 September 2016 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum.
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 59/POJK.03/2017 tanggal 18 Desember 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
10. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-06/MBU/04/2021 tanggal 13 April 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.
11. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-14/MBU/10/2021 tanggal 29 Oktober 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-12/MBU/2012 Tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.
12. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-1/MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
13. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.
14. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-3/MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.
15. Anggaran Dasar PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Tahun 2023.
16. Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 05/KOM/BTN/2023 tanggal 13 Desember 2023 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris.
17. Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Nomor 01/DEKOM-BTN/2021 – Nomor 01/DIR-BTN/2021 tanggal 26 Januari 2021 tentang Tata Hubungan Kerja Dewan Komisaris dan Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
18. Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 07/KOM/BTN/2023 tanggal 13 Desember 2023 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Remunerasi dan Nominasi.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi

Dalam menjalankan tugas pokoknya, Komite bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris untuk:

1. Tugas Komite terkait remunerasi adalah:
 - a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - Struktur remunerasi.
 - Kebijakan atas remunerasi.
 - Besaran atas remunerasi.
 - b. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - c. Dalam melaksanakan fungsi remunerasi, Komite wajib melakukan prosedur sebagai berikut:
 - Menyusun struktur, kebijakan dan besaran remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan

- Menyusun struktur, kebijakan dan besaran remunerasi bagi anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS).
 - d. Struktur remunerasi sebagaimana dimaksud dapat berupa Gaji, Honorarium, insentif dan/atau tunjangan yang bersifat tetap dan/atau variabel.
 - e. Penyusunan struktur, kebijakan dan besaran remunerasi harus memperhatikan:
 - Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha Bank dan skala usaha dari Bank dalam industrinya.
 - Tugas, tanggung jawab dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Bank.
 - Target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel.
 - f. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi yang didasarkan atas kinerja, risiko, kewajaran dengan peer group, sasaran, dan strategi jangka panjang Perseroan, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan potensi pendapatan Perseroan di masa yang akan datang.
 - g. Menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - Kebijakan Remunerasi bagi Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk disampaikan kepada Rapat umum Pemegang Saham.
 - Kebijakan Remunerasi bagi Pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
 - h. Melakukan evaluasi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun terhadap struktur, kebijakan dan besaran remunerasi.
 - i. Menyusun dan mengevaluasi sistem penggajian serta pemberian tunjangan kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta memberikan rekomendasi tentang:
 - Penilaian terhadap sistem tersebut;
 - Opsi yang diberikan, antara lain opsi atas saham;
 - Sistem Pensiun, Tunjangan Hari Tua; dan
 - Sistem kompensasi serta manfaat lainnya dalam hal pengurangan pegawai.
 - j. Melakukan tugas lainnya dari Dewan Komisaris sesuai dengan bidang tugas remunerasi.
19. Tugas Komite terkait Nominasi adalah:
- a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - Nominasi calon Direksi mengacu pada strategi Perusahaan;
 - Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi;
 - Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
 - Usulan pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Pengawas Syariah kepada RUPS.
 - b. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.
 - c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - d. Memberikan rekomendasi usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
 - e. Dalam melaksanakan fungsi Nominasi sebagaimana dimaksud Komite wajib melakukan prosedur sebagai berikut:
 - Menyusun komposisi dan proses nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - Menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - Membantu pelaksanaan evaluasi atas kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - Menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - Menelaah dan mengusulkan rekomendasi calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
 - f. Menyusun, melaksanakan, dan menganalisa kriteria serta prosedur nominasi bagi calon anggota Dewan Pengawas Syariah.
 - g. Memantau dan menganalisis kriteria serta prosedur nominasi bagi para eksklusif lainnya sampai dengan 1 (satu) tingkat di bawah Direksi.
 - h. Memberikan rekomendasi kriteria serta prosedur pemilihan, komposisi jabatan, pengangkatan, dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah.
 - i. Menyusun sistem penilaian kinerja anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
 - j. Melakukan reviu terhadap sistem manajemen sumber daya manusia dan kebijakan pengembangan manajemen sumber daya manusia mulai dari rekrutmen, asesmen, peningkatan kompetensi, evaluasi, promosi, demosi, terminasi, suksesi, seleksi dan lain-lain.
 - k. Melakukan reviu berkala atas sistem talenta (*talent management system*) perusahaan serta monitoring dan evaluasi atas pekerjaannya.
 - l. Melakukan evaluasi terhadap sistem dan prosedur pengklasifikasian talenta (*talent classification*) yang dilakukan oleh Direksi.

- m. Melakukan validasi dan kalibrasi atas talenta yang diusulkan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas (selected talent), untuk menghasilkan daftar talenta yang akan dinominasikan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas kepada RUPS/Menteri (nominated talent).
- n. Melakukan evaluasi terhadap calon wakil perseroan yang akan diusulkan sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris perusahaan anak, sebelum diajukan kepada RUPS/Menteri.
- o. Menyiapkan usulan sistem evaluasi kinerja individu bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas.
- p. Melakukan evaluasi atas usulan Direksi mengenai struktur organisasi perusahaan.
- q. Melakukan tugas lainnya dari Dewan Komisaris sesuai dengan bidang tugas Nominasi.
- r. Anggota Komite wajib menandatangani pakta integritas yang merupakan pernyataan dan komitmen untuk mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip tata Kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya Komite Remunerasi dan Nominasi mengacu pada Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 07/KOM/BTN/2023 tanggal 13 Desember 2023 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi bertujuan agar Komite dapat bekerja dengan lebih optimal sehingga penerapan pemberian rekomendasi atas remunerasi dan nominasi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif, dan Pegawai serta kebijakan *Human Capital* secara keseluruhan sesuai dengan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Muatan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi adalah sebagai berikut:

Bagian I	Ketentuan Umum	Pasal 1	Definisi
		Pasal 2	Tujuan Pembentukan Komite
Bagian II	Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Komite	Pasal 3	Tugas Komite
		Pasal 4	Tanggung Jawab
		Pasal 5	Wewenang
Bagian III	Keanggotaan	Pasal 6	Komposisi dan Struktur
		Pasal 7	Persyaratan Keanggotaan
		Pasal 8	Masa Jabatan

Bagian IV	Mekanisme dan Hubungan Kerja	Pasal 9	Mekanisme Kerja
		Pasal 10	Hubungan Kerja
		Pasal 11	Tenaga Penunjang
Bagian V	Perencanaan dan Pelaksanaan Kerja	Pasal 12	Rencana Kerja dan Penganggaran
		Pasal 13	Rapat Komite
		Pasal 14	Laporan
		Pasal 15	Evaluasi Kinerja
Bagian VI	Pengembangan Kompetensi dan Penghasilan	Pasal 16	Pengembangan Kompetensi
		Pasal 17	Penghasilan Anggota Komite
Bagian VII	Penutup	Pasal 18	Penutup

Wewenang Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite memiliki kewenangan dari Dewan Komisaris untuk:

1. Mereviu, memeriksa, melakukan Analisa dan memberikan pendapat serta rekomendasi dalam batas ruang lingkup tugasnya.
2. Meminta Bank untuk melakukan survei dan/atau studi banding (*benchmarking*) sesuai dengan kebutuhan Komite.
3. Meminta, mencari dan memperoleh informasi yang diperlukan dari pihak internal dan eksternal Bank.
4. Mencari dan memperoleh berbagai informasi termasuk dokumen yang diperlukan dari:
 - a. Pihak Bank BTN (termasuk pegawai Bank); dan/atau
 - b. Pihak berkepentingan lainnya.
5. Mendapatkan masukan dan atau saran dari pihak luar Bank BTN yang berkaitan dengan tugasnya.
6. Melakukan komunikasi secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan tugas-tugas komite.

Masa Tugas Komite Remunerasi dan Nominasi

1. Masa jabatan anggota Komite yang merupakan anggota Dewan Komisaris berhenti dengan sendirinya apabila masa jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris berakhir.
2. Masa jabatan anggota Komite yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris paling lama adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali selama 2 (dua) tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan anggota Komite yang bersangkutan sewaktu-waktu.
3. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris yang menjabat sebagai ketua Komite berhenti sebagai anggota Dewan Komisaris, ketua Komite wajib diganti oleh anggota Dewan Komisaris lainnya dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari.

Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Remunerasi dan Nominasi

Komposisi keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi beranggotakan paling sedikit 1 (satu) orang Komisaris Independen, 1 (satu) orang Komisaris, dan 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang membawahi sumber daya manusia atau 1 (satu) orang perwakilan pegawai. Komite diketuai oleh Komisaris Independen.

Dalam hal anggota Komite Remunerasi dan Nominasi yang ditetapkan lebih dari 3 (tiga) orang, maka anggota Komisaris Independen paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang. Apabila diperlukan, Komite Remunerasi dan Nominasi dapat mengangkat anggota yang berasal dari pihak luar yang independen terhadap Bank BTN.

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi diangkat oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris. Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai anggota Komite Remunerasi harus memiliki pengetahuan mengenai sistem remunerasi Bank dan memiliki pengetahuan tentang sistem nominasi dan rencana suksesi (*succession plan*) Bank.

Anggota Komite diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris. Keputusan tersebut harus ditindaklanjuti oleh Direksi dengan menerbitkan surat pengangkatan/pemberhentian. Keputusan pengangkatan dan/atau pemberhentian oleh anggota Komite wajib didokumentasikan. Ketua Komite hanya dapat merangkap jabatan sebagai ketua komite paling banyak 1 (satu) pada Komite lainnya.

Tabel Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Remunerasi dan Nominasi

Nama	Jabatan	Keterangan	Keahlian	Dasar Pengangkatan
Chandra M. Hamzah	Ketua merangkap Anggota	Komisaris Utama/ Independen	Hukum, Keuangan, Manajemen Risiko, dan <i>People Management</i>	Surat Dewan Komisaris Nomor 03/KOM/BTN/1/2020 tanggal 8 Januari 2020
Iqbal Latanro	Anggota	Wakil Komisaris Utama/Independen	Perbankan, Kepatuhan, Manajemen Risiko dan <i>People Management</i>	Keputusan Dewan Komisaris Nomor 03/KOM/BTN/IV/2021 tanggal 1 April 2021
Ahdi Jumhari Luddin ¹	Anggota	Komisaris Independen	Perbankan, Kepatuhan dan Manajemen Risiko	Surat Dewan Komisaris Nomor 03/KOM/BTN/1/2020 tanggal 8 Januari 2020
Armand B. Arief	Anggota	Komisaris Independen	Perbankan, Manajemen Risiko, Manajemen Bisnis dan <i>People Management</i>	Surat Dewan Komisaris Nomor 03/KOM/BTN/1/2020 tanggal 8 Januari 2020
Sentot A. Sentausa	Anggota	Komisaris Independen	Perbankan, Kepatuhan, dan Manajemen Risiko	Keputusan Dewan Komisaris Nomor 08/KOM/BTN/2022 tanggal 13 Oktober 2022
Andin Hadiyanto	Anggota	Komisaris	Perbankan, Kepatuhan, Manajemen Risiko dan Bisnis Administrasi	Surat Dewan Komisaris Nomor 03/KOM/BTN/1/2020 tanggal 8 Januari 2020
Herry Trisaputra Zuna	Anggota	Komisaris	Ekonomi Makro, Manajemen Risiko, dan Bisnis Administrasi	Keputusan Dewan Komisaris Nomor 08/KOM/BTN/2022 tanggal 13 Oktober 2022
Himawan Arief Sugoto	Anggota	Komisaris	Manajemen dan Bisnis, Manajemen Risiko, keuangan, Agraria dan Tata Ruang	Keputusan Dewan Komisaris Nomor 08/KOM/BTN/2022 tanggal 13 Oktober 2022
Mohamad Yusuf Permana ²	Anggota	Komisaris	Perbankan, Ekonomi Makro, Manajemen Risiko dan <i>People Management</i>	Keputusan Dewan Komisaris Nomor 04/KOM/BTN/2023 tanggal 18 Januari 2023
Moch. Amin Nurdin	Anggota	Pihak Independen	<i>Human Capital, Finance, dan Corporate Relation</i>	Keputusan Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Nomor: 1003/DIR/2021 Tentang Pengangkatan Sdr. Moch. Amin Nurdin Sebagai Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Rahmayati	Anggota (<i>Ex Officio</i>)	Pejabat Eksekutif yang membawahi SDM	<i>Human Capital, Finance, dan Corporate Relation</i>	Keputusan Dewan Komisaris Nomor 08/KOM/BTN/2022 tanggal 13 Oktober 2022

Keterangan:

¹ Masa jabatan sebagai anggota Komite Remunerasi dan Nominasi berakhir dengan sendirinya karena meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2023.

² Lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh OJK pada tanggal 07 Juni 2023.

Profil Komite Remunerasi dan Nominasi per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut.

Chandra M. Hamzah Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi	Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris. Periode menjabat beliau sebagai Ketua merangkap anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sejak tanggal 27 November 2019 - 26 November 2024	Andin Hadiyanto Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi	Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris. Periode menjabat beliau sebagai anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sejak tanggal 27 November 2019 - 26 November 2024
Iqbal Latanro Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi	Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris. Periode menjabat beliau sebagai anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sejak tanggal 10 Maret 2021 - 26 November 2026	Herry Trisaputra Zuna Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi	Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris. Periode menjabat beliau sebagai Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi pada tanggal 02 Maret 2022 - 01 Maret 2027
Armand B. Arief Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi	Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris. Periode menjabat beliau sebagai anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sejak tanggal 27 November 2019 - 26 November 2024	Himawan Arief Sugoto Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi	Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris. Periode menjabat beliau sebagai Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi pada tanggal 02 Maret 2022 - 01 Maret 2027
Sentot A. Sentausa Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi	Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris. Periode menjabat beliau sebagai Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sejak tanggal 02 Maret 2022 - 01 Maret 2027	Mohamad Yusuf Permana Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi	Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris. Periode menjabat beliau sebagai Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi pada tanggal 11 Januari 2023 - 10 Januari 2028



MOCH. AMIN NURDIN

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Warga Negara Indonesia, berusia 50 tahun, berdomisili di Bekasi, Jawa Barat.



Riwayat Pendidikan

- Sarjana (S1) Administrasi Bisnis, Universitas Diponegoro Semarang, Semarang (1997).
- Magister (S2) Marketing, PPM Graduate School of Management, Jakarta (2006).
- Magister (S2) Human Resource Management, Universitas Mercu Buana, Jakarta (2019)



Pengalaman Kerja

- Jakarta Area Head, Bank CIMB Niaga, 2008
- Senior Faculty, LPPI, Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, 2018
- Kepala Divisi Pemasaran dan Pelatihan 1, LPPI, 2020
- Kepala LPK LPPI, Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, 2020
- Kepala Divisi Pelatihan Bank, Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, 2022 s.d. saat ini



Periode dan Masa Jabatan

Keputusan Direksi Nomor 1003/DIR/2021 tanggal 08 November 2021 tentang Pengangkatan Sdr. Moch. Amin Nurdin sebagai Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi



Dasar Hukum Pengangkatan

215/M/HCMD/TAC/VII/2021



Jabatan Rangkap

Kepala Divisi Pelatihan Bank, Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, 2022 s.d. saat ini



Sertifikasi

- *Certified Audit Committee Practices*, 2023
- *Certified Human Resources Analyst*, 2018
- *Certified Trainer for General Banking Level 1,2,3 Tahun 2014*
- *Certified General Banking Level 2 (Branch Manager and BOD-2)*, 2016
- *Certified Trainer for BPR/BPRS Leader (BOD/BOC)*, 2013
- *Certified Trainer for Risk Management Level 1*, 2012



RAHMAYATI

Anggota Ex-officio Komite Remunerasi dan Nominasi

Warga Negara Indonesia, berusia 50 tahun, berdomisili di Jakarta Timur, DKI Jakarta



Riwayat Pendidikan

- Magister (S-2) Business Administration dari Institut Teknologi Bandung Tahun 2012
- Sarjana (S-1) Teknik Sipil dari Universitas Hasanuddin Tahun 1996



Pengalaman Kerja

- School of Business & Sharia Banking DH, Sharia Business Division (29 Januari 2019 - 28 Februari 2021)
- Sharia Business Deputy, Sharia Business Division (1 April 2021 - 30 November 2021)
- Sharia Funding & Treasury Deputy, Sharia Business Division (1 Desember 2021 - 13 Februari 2022)
- PJ Human Capital Management Division Head, Human Capital Management Division (14 Februari 2022 - 30 September 2022)
- Human Capital Management Division Head, Human Capital Management Division (01 Oktober 2022 - saat ini)



Periode dan Masa Jabatan

Periode Pertama dengan Masa Jabatan: 17 Maret 2022 - 16 Maret 2025



Dasar Hukum Pengangkatan

Keputusan Dewan Komisaris Nomor 08/KOM/BTN/2022 tanggal 13 Oktober 2022



Jabatan Rangkap

Human Capital Management Division Head, Human Capital Management Division, 01 Oktober 2022 - saat ini



Sertifikasi

- Certified Human Resources Manager (2023)
- Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko Level 3 (2022)
- Sertifikasi Pengetahuan Dasar Bidang Dana Pensiun (2022)
- Pelatihan PSAK 24 (2022)
- Professional Coach Certification Program (2021)
- Sertifikasi Treasury Level Basic (2021)
- 4DX : Managers Implementation (2020)
- Certified Professional Human Resource (2019)

Independensi Komite Remunerasi dan Nominasi

Tabel Independensi Komite Remunerasi dan Nominasi

Aspek Independensi	Chandra M. Hamzah	Iqbal Latanro	Ahdi Jumhari Luddin	Armand B. Arief	Sentot A. Sentausa	Andin Hadiyanto	Herry Trisaputra Zuna	Himawan Arief Sugoto	Mohamad Yusuf Permana	Moch. Amin Nurdin	Rahmayati
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Aspek Independensi	Chandra M. Hamzah	Iqbal Latanro	Ahdi Jumhari Luddin*	Armand B. Arief	Sentot A. Sentausa	Andin Hadiyanto	Herry Trisaputra Zuna	Himawan Arief Sugoto	Mohamad Yusuf Permana**	Moch. Amin Nurdin	Rahmayati
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham lebih dari atau sama dengan 5% (lima persen) di Perseroan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Remunerasi dan Nominasi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

* Berhenti masa jabatan karena meninggal dunia tanggal 12 Agustus 2023.

** Diletakkan sebagai anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sejak 11 Januari 2023.

Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Komite Remunerasi dan Nominasi Pada Tahun 2023

Nama	Jabatan	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
Chandra M. Hamzah	Ketua merangkap Anggota	Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris		
Iqbal Latanro	Anggota	Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris		
Ahdi Jumhari Luddin*	Anggota	Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris		
Armand B. Arief	Anggota	Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris		
Sentot A. Sentausa	Anggota	Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris		
Andin Hadiyanto	Anggota	Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris		
Herry Trisaputra Zuna	Anggota	Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris		
Himawan Arief Sugoto	Anggota	Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris		
Mohamad Yusuf Permana**	Anggota	Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris		
Moch. Amin Nurdin	Anggota	Board of Commissioner Forum 2023	15 - 16 September 2023 di Ayana Hotel Waecicu Beach, Labuan Bajo, NTT	LPPI
		Certification Audit Committee Practices Angkatan 36	28 - 30 November 2023 di Hotel Sahid Jaya	IKAI
		Konferensi Nasional Komite Audit 2023	25 Oktober 2023 di Hotel Sahid Jaya	IKAI
Rahmayati	Anggota (Ex Officio)	Expert Talk Session - The Future of Competitive Strategy For Great Business Transformation	4 Maret 2023 di Park Hyatt Hotel Jakarta	Markplus
		Workshop Team HCCL 2023	10 - 11 Maret 2023 di Royal Tulip Gunung Geulis Bogor	BTN

Nama	Jabatan	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
		<i>Leadership Forum "Envisioning Culture For Leader"</i>	12 – 13 Mei 2023 di Padma Hotel Semarang	PwC dan Korn Ferry
		Seminar Dana Pensiun	20 Juli 2023 di Learning Center BTN Jakarta	BTN
		<i>Certified Human Resources Manager</i>	30 September 2023 di Learning Center BTN Jakarta	Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Sumber Daya Manusia (LSP-MSDM)

Keterangan:

* Berhenti masa jabatan karena meninggal dunia tanggal 12 Agustus 2023.

** Ditetapkan sebagai anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sejak 11 Januari 2023.

Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

KEBIJAKAN RAPAT KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Rapat dilaksanakan sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan minimal rapat Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank. Kuorum rapat dihadiri oleh minimal 51% (lima puluh satu persen) anggota Komite, baik secara langsung maupun melalui media lain yang ditentukan. Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi dianggap sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota Komite termasuk 1 (satu) orang Komisaris Independen dan 1 (satu) Pihak Independen.

Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak dapat menghadiri rapat secara fisik, maka dapat menghadiri rapat dengan menggunakan surat kuasa, teknologi telekonferensi dan cara-cara lain yang diperbolehkan sesuai tata cara dan ketentuan perundangan yang berlaku.

Rapat dipimpin oleh Ketua Komite atau anggota yang ditunjuk oleh anggota yang hadir, apabila Ketua Komite berhalangan hadir. Keputusan rapat Komite dilakukan berdasarkan musyawarah dan mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak dengan prinsip 1 (satu) orang 1 (satu) suara (*one man one vote*).

Hasil rapat Komite dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite yang hadir, didokumentasikan dengan baik dan disampaikan kepada Dewan Komisaris. Hasil rapat mencakup waktu dan tempat rapat, agenda rapat peserta yang hadir, topik yang dibahas, perbedaan pendapat (bila ada) dan keputusan rapat. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat Komite wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat.

Komite dapat mengadakan rapat atau pertemuan khusus bila diperlukan. Rapat komite dapat mengundang manajemen atau pihak lain sebagai narasumber. Rapat diselenggarakan berdasarkan undangan dan agenda yang sudah disepakati sebelum rapat dilakukan dan hasil-hasil rapat harus tercatat dalam risalah, dokumen yang aslinya disimpan oleh Komite serta salinannya disampaikan kepada Sekretaris Dewan Komisaris dan apabila diperlukan dapat dibagikan kepada undangan yang tidak hadir dalam rapat tersebut.

Keputusan rapat komite dinyatakan sah dan mengikat, apabila dihadiri sekurang-kurangnya 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota Komite termasuk Komisaris Independen dan Pejabat Eksekutif yang membawahi sumber daya manusia.

AGENDA RAPAT KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Tabel Agenda Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat
1.	11 Januari 2023	- Perubahan <i>Key Performance Indicator</i> (KPI) Direktorat Tahun 2022 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. - Penilaian terhadap Calon Anggota Dewan Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	- Chandra M. Hamzah - Iqbal Latanro - Ahdi Jumhari Luddin - Armand B. Arief - Andin Hadiyanto - Sentot A. Sentausa - Herry Trisaputra Zuna - Himawan Arief Sugoto - Moch. Amin Nurdin

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat
2	15 Februari 2023	Pembahasan Hasil Wawancara Kandidat Anggota Komite Audit	• Chandra M. Hamzah • Iqbal Latanro • Ahdi Jumhari Luddin • Armand B. Arief • Andin Hadiyanto • Sentot A. Sentausa • Herry Trisaputra Zuna • Himawan Arief Sugoto • Mohamad Yusuf Permana (sebagai pengamat) • Moch. Amin Nurdin
3.	22 Februari 2023	1. Pembahasan Hasil Wawancara Kandidat Komite Audit Tahap II; 2. Penyeleksian <i>Nominated Talent</i> BoD-1; dan 3. Rekomendasi atas Perpanjangan Kontrak Kerja SEVP Wholesale Banking.	• Chandra M. Hamzah • Iqbal Latanro • Ahdi Jumhari Luddin • Armand B. Arief • Andin Hadiyanto • Sentot A. Sentausa • Herry Trisaputra Zuna • Himawan Arief Sugoto • Mohamad Yusuf Permana (sebagai pengamat) • Moch. Amin Nurdin
4.	27 Februari 2023	Evaluasi terhadap <i>Nominated Talent</i> BoD Existing	• Chandra M. Hamzah • Iqbal Latanro • Ahdi Jumhari Luddin • Armand B. Arief • Andin Hadiyanto • Sentot A. Sentausa • Herry Trisaputra Zuna • Himawan Arief Sugoto • Mohamad Yusuf Permana (sebagai pengamat) • Moch. Amin Nurdin
5.	01 Maret 2023	1. Usulan Remunerasi Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah Tahun 2023 serta Tantiem Dewan Komisaris dan Direksi Tahun Buku 2023; 2. Rekomendasi Kandidat Anggota Komite Audit; 3. Rekomendasi <i>Nominated Talent</i> BoD Existing;	• Chandra M. Hamzah • Iqbal Latanro • Ahdi Jumhari Luddin • Armand B. Arief • Andin Hadiyanto • Sentot A. Sentausa • Herry Trisaputra Zuna • Himawan Arief Sugoto • Mohamad Yusuf Permana (sebagai pengamat) • Moch. Amin Nurdin
6.	15 Maret 2023	1. Rekomendasi Perubahan Susunan Dewan Pengawas Syariah 2. Rekomendasi Calon Pengurus Perseroan	• Chandra M. Hamzah • Iqbal Latanro • Armand B. Arief • Andin Hadiyanto • Sentot A. Sentausa • Herry Trisaputra Zuna • Himawan Arief Sugoto • Mohamad Yusuf Permana (sebagai pengamat) • Moch. Amin Nurdin
7.	05 April 2023	1. Penelaahan terhadap Usulan Pergantian Sekretaris Perusahaan 2. Rekomendasi Perubahan Struktur Organisasi Kantor Pusat	• Chandra M. Hamzah • Iqbal Latanro • Armand B. Arief • Andin Hadiyanto • Sentot A. Sentausa • Herry Trisaputra Zuna • Himawan Arief Sugoto • Mohamad Yusuf Permana (sebagai pengamat) • Moch. Amin Nurdin • Rahmayati

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat
8.	12 April 2023	Rekomendasi Persetujuan Pergantian Sekretaris Perusahaan	• Chandra M. Hamzah • Iqbal Latanro • Armand B. Arief • Andin Hadiyanto • Sentot A. Sentausa • Herry Trisaputra Zuna • Himawan Arief Sugoto • Mohamad Yusuf Permana (sebagai pengamat) • Moch. Amin Nurdin • Rahmayati
9.	17 Mei 2023	Rekomendasi Penetapan KPI Direksi secara Kolegal dan KPI PMN Tahun 2023	• Chandra M. Hamzah • Iqbal Latanro • Armand B. Arief • Andin Hadiyanto • Sentot A. Sentausa • Herry Trisaputra Zuna • Himawan Arief Sugoto • Mohamad Yusuf Permana (sebagai pengamat) • Moch. Amin Nurdin • Rahmayati
10.	24 Mei 2023	Rekomendasi Perubahan Struktur Organisasi Kantor Pusat CRSD, CAMD 1 dan CAMD 2	• Chandra M. Hamzah • Iqbal Latanro • Armand B. Arief • Andin Hadiyanto • Sentot A. Sentausa • Herry Trisaputra Zuna • Himawan Arief Sugoto • Mohamad Yusuf Permana (sebagai pengamat) • Moch. Amin Nurdin • Rahmayati
11.	7 Juni 2023	Rekomendasi Calon Anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) Unit Usaha Syariah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	• Chandra M. Hamzah • Iqbal Latanro • Armand B. Arief • Andin Hadiyanto • Sentot A. Sentausa • Herry Trisaputra Zuna • Himawan Arief Sugoto • Mohamad Yusuf Permana • Moch. Amin Nurdin • Rahmayati
12.	14 Juni 2023	Pendalaman Rekomendasi Calon Anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) Unit Usaha Syariah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	• Chandra M. Hamzah • Iqbal Latanro • Armand B. Arief • Andin Hadiyanto • Sentot A. Sentausa • Herry Trisaputra Zuna • Himawan Arief Sugoto • Mohamad Yusuf Permana • Moch. Amin Nurdin • Rahmayati
13.	05 Juli 2023	Pembahasan Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2023	• Chandra M. Hamzah • Iqbal Latanro • Ahdi Jumhari Luddin • Armand B. Arief • Andin Hadiyanto • Sentot A. Sentausa • Herry Trisaputra Zuna • Himawan Arief Sugoto • Mohamad Yusuf Permana • Moch. Amin Nurdin

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat
15.	21 Agustus 2023	Progress Kebijakan Khusus Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Organ Pendukung Dewan Komisaris.	• Chandra M. Hamzah • Iqbal Latanro • Armand B. Arief • Andin Hadiyanto • Sentot A. Sentausa • Herry Trisaputra Zuna • Himawan Arief Sugoto • Mohamad Yusuf Permana • Moch. Amin Nurdin • Rahmayati
16.	11 Oktober 2023	1. Evaluasi Kinerja Sekretaris dan Staf Sekretariat Dewan Komisaris 2. Update Penyusunan Format Penilaian <i>Key Performance Indicators</i> (KPI) Individual Anggota Dewan Komisaris dan Komite Organ Pendukung Dewan Komisaris	• Chandra M. Hamzah • Iqbal Latanro • Armand B. Arief • Andin Hadiyanto • Sentot A. Sentausa • Herry Trisaputra Zuna • Himawan Arief Sugoto • Mohamad Yusuf Permana • Moch. Amin Nurdin • Rahmayati
17.	18 Oktober 2023	Penilaian Kinerja Sekretaris dan Staf Sekretariat Dewan Komisaris	• Chandra M. Hamzah • Iqbal Latanro • Armand B. Arief • Andin Hadiyanto • Sentot A. Sentausa • Herry Trisaputra Zuna • Himawan Arief Sugoto • Mohamad Yusuf Permana • Moch. Amin Nurdin • Rahmayati
18	1 November 2023	1. Persetujuan Rangkap Jabatan Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk 2. Persetujuan Penambahan Human Capital Business Partner Division dalam Struktur Organisasi Kantor Pusat PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	• Chandra M. Hamzah • Iqbal Latanro • Armand B. Arief • Andin Hadiyanto • Sentot A. Sentausa • Herry Trisaputra Zuna • Himawan Arief Sugoto • Mohamad Yusuf Permana • Moch. Amin Nurdin • Rahmayati
19.	8 November 2023	Update Pembahasan Persetujuan Rangkap Jabatan Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	• Chandra M. Hamzah • Iqbal Latanro • Armand B. Arief • Andin Hadiyanto • Sentot A. Sentausa • Herry Trisaputra Zuna • Himawan Arief Sugoto • Mohamad Yusuf Permana • Moch. Amin Nurdin • Rahmayati
20.	21 November 2023	Pembahasan Anggaran Tantiem Direksi dan Dewan Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2024	• Chandra M. Hamzah • Iqbal Latanro • Armand B. Arief • Andin Hadiyanto • Sentot A. Sentausa • Herry Trisaputra Zuna • Himawan Arief Sugoto • Mohamad Yusuf Permana • Moch. Amin Nurdin • Rahmayati
21.	29 November 2023	1. Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) Unit Usaha Syariah (UUS) 2. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk; dan 3. Penetapan Remunerasi Dewan Pengawas Syariah (DPS) Unit Usaha Syariah (UUS) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	• Chandra M. Hamzah • Iqbal Latanro • Armand B. Arief • Andin Hadiyanto • Sentot A. Sentausa • Herry Trisaputra Zuna • Himawan Arief Sugoto • Mohamad Yusuf Permana • Moch. Amin Nurdin • Rahmayati

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat
22.	6 Desember 2023	Penilaian Kinerja Komite Organ Pendukung Dewan Komisaris	- Chandra M. Hamzah - Iqbal Latanro - Armand B. Arief - Andin Hadiyanto - Sentot A. Sentausa - Herry Trisaputra Zuna - Himawan Arief Sugoto - Mohamad Yusuf Permana - Moch. Amin Nurdin - Rahmayati
23.	13 Desember 2023	- Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. - Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. - Program Kerja Dewan Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Tahun 2024 - Program Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Tahun 2024 - Pedoman Pola Hubungan Kerja Dewan Komisaris dan Direksi	- Chandra M. Hamzah - Iqbal Latanro - Armand B. Arief - Andin Hadiyanto - Sentot A. Sentausa - Herry Trisaputra Zuna - Himawan Arief Sugoto - Mohamad Yusuf Permana - Moch. Amin Nurdin - Rahmayati

FREKUENSI DAN TINGKAT KEHADIRAN RAPAT KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Tabel Tingkat Kehadiran Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Nama	Jabatan	Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi		
		Jumlah dan Persentase Kehadiran		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase
Chandra M. Hamzah	Ketua merangkap Anggota	23	23	100%
Iqbal Latanro	Anggota	23	23	100%
Ahdi Jumhari Luddin ¹	Anggota	6	6	100%
Armand B. Arief	Anggota	23	23	100%
Sentot A. Sentausa	Anggota	23	23	100%
Andin Hadiyanto	Anggota	23	23	100%
Herry Trisaputra Zuna	Anggota	23	23	100%
Himawan Arief Sugoto	Anggota	23	23	100%
Mohamad Yusuf Permana ²	Anggota	13	13	100%
Moch. Amin Nurdin	Anggota	23	23	100%
Rahmayati	Anggota (Ex Officio)	23	16	69,6%

Keterangan:

¹ Kehadiran Bpk. Ahdi Jumhari Luddin dalam rapat dikarenakan kondisi kesehatan hingga Ybs. meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2023.

² Lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan oleh OJK pada tanggal 07 Juni 2023.

Program Kerja dan Pelaksanaan Tugas Komite Remunerasi dan Nominasi Tahun 2023

No	Rencana Kerja	Pelaksanaan	Keterangan
I Reguler			
1.	Penelaahan Rencana Kegiatan Pendidikan Tahun 2023	Tidak Terlaksana	SK DIR Bank Indonesia No. 31/310/KEP/DIR tahun 1999 tentang Penyediaan Dana untuk Pengembangan Sumber Daya Manusia Bank Umum dinyatakan dicabut dan tidak berlaku, sehingga penelaahan Rencana Kegiatan Pendidikan Tahun 2023 tidak melalui putusan Dewan Komisaris
2.	Validasi atas Usulan <i>Selected Talent</i> BOD-1 Bank BTN	Terlaksana	-
3.	Rekomendasi dan Penilaian Calon Anggota BOC dan BOD untuk <i>Fit & Proper Test</i> terkait dengan pelaksanaan RUPS Tahunan atau Luar Biasa	Terlaksana	-
4.	Penelaahan Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Bisnis Bank (RBB)	Terlaksana	-

No	Rencana Kerja	Pelaksanaan	Keterangan
5.	Penelaahan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB)	Terlaksana	-
6.	Penelaahan KPI Kolegial dan Individual BOD	Terlaksana	-
7.	Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas	Terlaksana	-
8.	Penetapan Besaran Tantiem dan Bonus serta Insentif lain yang terkait untuk BOD dan BOC	Terlaksana	-
9.	Merancang Program Kerja Dewan Komisaris	Terlaksana	-
10.	Menyampaikan Laporan Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola Bank (<i>Self Assessment GCG</i>)	Terlaksana	-
11.	Laporan Komite Remunerasi dan Nominasi	Terlaksana	-
II Non-Reguler			
12.	Evaluasi Kebijakan / SOP <i>Human Capital, Strategy, dan Learning</i>	Terlaksana	-
13.	Evaluasi Kebijakan / Implementasi SOP Tengah Alih Daya	Terlaksana	-
14.	Penetapan Corporate Secretary Head dan Internal Audit Head	Terlaksana	-
15.	Penetapan SEVP untuk beberapa posisi sesuai struktur Organisasi terbaru	Terlaksana	-
III Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Komite			
16.	Melakukan komunikasi dengan Satuan Kerja Sumber Daya Manusia	Terlaksana	-
IV Tugas Khusus dan Lain-lain			
17.	Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi	Terlaksana	-
18.	Tugas lain dari Ketua Komite/ Dewan Komisaris	Terlaksana	-

Kebijakan Suksesi Direksi

Dalam membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris terkait suksesi Direktur Utama dan jajaran Direksi lainnya sebagaimana Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (Permen BUMN) No. 3 tahun 2023 perihal Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, setiap tahun Dewan Komisaris meninjau pelaporan pelaksanaan rencana pengembangan dan suksesi yang disampaikan Direksi. Komite Remunerasi dan Nominasi melaksanakan mekanisme proses penyampaian *nominated talent* sebagai kandidat Direksi BUMN yaitu:

1. **Selected Talent**

Penetapan *Selected Talent* BoD-1 dilakukan melalui Rapat Direksi di BUMN masing-masing.

2. **Nominated Talent**

Reviu dan Penetapan *Nominated Talent* BoD-1 oleh Dewan Komisaris BUMN masing-masing melalui Komite Remunerasi dan Nominasi.

3. **Nominated Talent Cluster**

Nominated Talent akan divalidasi dan kalibrasi oleh *Cluster Talent Committee* (CTC) untuk menjadi *Eligible Talent*.

4. **Eligible Talent**

Nominated Talent Cluster akan dilakukan *background checking* oleh KBUMN melalui *Deputy Sumber Daya Manusia & Teknologi Informasi* (SDMTI) KBUMN yang selanjutnya menjadi *Eligible Talent*.

5. **Qualified Talent**

Eligible Talent akan menjalani *Assessment* pada *Assessment Center* yang ditunjuk oleh Kementerian BUMN yang selanjutnya menjadi *Qualified Talent*.

Adapun sumber dari *Selected Talent* maupun *Nominated Talent* dari BUMN merupakan BOD-1 dari BUMN maupun Anak Usaha BUMN yang berkontribusi signifikan dan bernilai strategis atau BOD-1 dari BUMN maupun Anak Usaha BUMN yang diberlakukan sama sesuai dengan BUMN sesuai dengan Undang-Undang.



Dalam menyiapkan kandidat atau suksesor Direksi Perseroan, dilakukan berbagai pengembangan talenta Perseroan khususnya BOD-1, BOD-2 dan *Women Talent* serta *Millennial Talent* untuk meningkatkan *Readiness Level* serta dipersiapkan menjadi *Nominated Talent* di antaranya melalui program:

1. *Expert Talk Session*;
2. *Project Assignment*;
3. *Cross mentoring*;
4. *Roundtable Mentorship*;
5. SESPIBANK;
6. *Asesmen Orientation Day*.

Adapun dalam proses pencarian *Talent* BOD-1 dari eksternal di tahun 2023 dimana nantinya juga akan disiapkan menjadi kandidat Direksi (BOD) Perseroan melalui mekanisme pengembangan dan usulan *nominated talent*, Perseroan menggunakan jasa perusahaan pencari profesional/*head hunter* yaitu PT Daya Dimensi Indonesia (DDI).

Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko adalah Organ Pendukung yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris yang bertugas membantu Dewan Komisaris dalam melakukan evaluasi terhadap kesesuaian antara Kebijakan Manajemen Risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut dan memantau serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.

Tujuan pembentukan Komite adalah untuk membantu dan mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam memastikan terlaksananya pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan intern Perseroan yang berkaitan dengan:

1. Terlaksananya fungsi pengawasan manajemen risiko yang kuat;
2. Terbangunnya budaya manajemen risiko sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya praktik-praktik perbankan yang tidak sehat; dan
3. Teridentifikasinya hal-hal berkaitan dengan manajemen risiko yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris.

Dasar Pembentukan Komite Pemantau Risiko

Perseroan membentuk Komite Pemantau Risiko berdasarkan peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum

2. Surat Edaran OJK Nomor 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
3. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
4. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-3/MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara;
5. Keputusan Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-3/DKU.MBU/05/2023 tentang Petunjuk Teknis Komposisi dan Kualifikasi Organ Pengelola Risiko di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
6. Anggaran Dasar Perseroan.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

Sejalan dengan Piagam Komite Pemantau Risiko, tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko antara lain sebagai berikut:

1. Mengumpulkan dan mengevaluasi informasi, klarifikasi, dokumen dan/atau laporan yang berkaitan dengan penerapan manajemen risiko.
2. Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko Bank dengan penerapan manajemen risiko.
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja manajemen risiko.
4. Memantau kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian, dan sistem informasi manajemen risiko.
5. Mendorong pemberdayaan fungsi manajemen risiko Bank.
6. Melaporkan kepada Dewan Komisaris dalam hal kemungkinan terjadinya risiko Bank serta mengusulkan alternatif penyelesaian.
7. Melakukan kegiatan pemantauan risiko di satuan kerja yang erat kaitannya dengan pengambilan keputusan berbasis risiko dan bekerja sama dengan satuan kerja manajemen risiko.
8. Melakukan *reviu*, evaluasi, dan/atau memberikan rekomendasi atas hal-hal yang memerlukan persetujuan, konsultasi, maupun pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris sesuai dengan Anggaran Dasar, Tata Hubungan Kerja Dewan Komisaris dan Direksi, serta ketentuan regulator.
9. Melakukan tugas lainnya dari Dewan Komisaris sesuai dengan bidang tugas manajemen risiko.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko disusun berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan senantiasa ditinjau secara berkala yang mana pada terakhir kali telah diperbarui berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 08/KOM/BTN/2023 tanggal 13 Desember 2023 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, dengan isi muatan sebagai berikut:

Bab I Ketentuan Umum	Pasal 1 Definisi
	Pasal 2 Tujuan
Bab II Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang	Pasal 3 Tugas dan Tanggung Jawab
	Pasal 4 Wewenang
Bab III Struktur dan Keanggotaan	Pasal 5 Komposisi dan Struktur
	Pasal 6 Persyaratan Keanggotaan
	Pasal 7 Masa Jabatan
Bab IV Mekanisme dan Hubungan Kerja	Pasal 8 Mekanisme Kerja
	Pasal 9 Hubungan Kerja
	Pasal 10 Tenaga Penunjang
Bab V Perencanaan dan Pelaksanaan Kerja	Pasal 11 Rencana Kerja dan Penganggaran
	Pasal 12 Rapat Komite
	Pasal 13 Laporan
	Pasal 14 Evaluasi
Bab VI Pengembangan Kompetensi dan Penghasilan	Pasal 15 Pengembangan Kompetensi
	Pasal 16 Penghasilan
Bab VII Lain-Lain	Pasal 17 Penutup

Wewenang Komite Pemantau Risiko

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Pemantau Risiko memiliki kewenangan untuk:

1. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Bank terkait dengan tugas dan fungsi Komite Pemantau Risiko.
2. Melakukan komunikasi dengan Direksi dan/atau Pejabat Eksekutif serta pihak internal Bank untuk memperoleh informasi, klarifikasi, serta meminta dokumen dan laporan yang diperlukan.
3. Mendapatkan masukan dan/atau saran dari pihak luar Bank yang berkaitan dengan tugas Komite Pemantau Risiko.

Masa Tugas Komite Pemantau Risiko

1. Masa jabatan anggota Komite yang merupakan anggota Dewan Komisaris berhenti dengan sendirinya apabila masa jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris berakhir;
2. Masa jabatan anggota Komite yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris paling lama adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali selama 2 (dua) tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan anggota Komite yang bersangkutan sewaktu-waktu;
3. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris yang menjabat sebagai ketua Komite berhenti sebagai anggota Dewan Komisaris, ketua Komite wajib diganti oleh anggota Dewan Komisaris lainnya dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari.

Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Pemantau Risiko

Tabel Struktur, Keanggotaan dan Keahlian Komite Pemantau Risiko

Nama	Jabatan	Keterangan	Keahlian	Dasar Pengangkatan
Armand B. Arief	Ketua merangkap anggota	Komisaris Independen	Perbankan, Manajemen Risiko, Manajemen Bisnis	Surat Dewan Komisaris Nomor 03/KOM/BTN/I/2020 tanggal 08 Januari 2020
Herry Trisaputra Zuna	Anggota	Komisaris	Ekonomi Makro, Manajemen, Pekerjaan Umum dan Perumahan	Keputusan Dewan Komisaris Nomor 04/KOM/BTN/2022 tanggal 17 Maret 2022

Nama	Jabatan	Keterangan	Keahlian	Dasar Pengangkatan
Himawan Arief Sugoto	Anggota	Komisaris	Manajemen dan Bisnis, Manajemen Risiko, Keuangan, Agraria dan Tata Ruang	Keputusan Dewan Komisaris Nomor 04/KOM/BTN/2022 tanggal 17 Maret 2022
Ignace Widiatmoko	Anggota	Pihak Independen	Manajemen Risiko, Perbankan, Keuangan, Perbankan Syariah	Keputusan Direksi Nomor 1002/DIR/2021 tanggal 8 November 2021
Pamuji Gesang Raharjo	Anggota	Pihak Independen	Perbankan, Manajemen Risiko, Keuangan, Perbankan Syariah	Keputusan Direksi Nomor 1067/DIR/2021 tanggal 1 Desember 2021

Profil Komite Pemantau Risiko

Profil Komite Pemantau Risiko per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut.

ARMAND B. ARIEF Ketua Komite Pemantau Risiko	Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris. Periode menjabat beliau sebagai Ketua merangkap anggota Komite Pemantau Risiko pada tanggal 27 November 2019–26 November 2024	HIMAWAN ARIEF SUGOTO Anggota Komite Pemantau Risiko	Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris. Periode menjabat beliau sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko pada tanggal 02 Maret 2022–01 Maret 2027
HERRY TRISAPUTRA ZUNA Anggota Komite Pemantau Risiko	Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris. Periode menjabat beliau sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko pada tanggal 02 Maret 2022–01 Maret 2027		



IGNACE WIDIATMOKO

Anggota Komite Pemantau Risiko

Warga Negara Indonesia, berusia 63 tahun, berdomisili di Kota Tangerang Selatan Banten



Riwayat Pendidikan

- Sarjana Ekonomi Perusahaan Universitas Diponegoro Semarang (1984)
- Master of Business Administration di Rutgers The State University (1995)



Pengalaman Kerja

- Vice President of Risk Management of Bank Mandiri (2007-2015);
- Commissioner of PT Resik Guna Maju (2015-2018);
- Managing Director PT Gedung Bank Exim (2015-2018);
- Risk Monitoring Committee and Audit Committee of Rabobank International Indonesia (2018-2020);
- Risk Monitoring Committee of Industrial Commercial of Bank of China Indonesia (2018-2021);
- Risk Monitoring Committee and Audit Committee of Bank Victoria International Tbk (2021).



Sertifikasi

- *Certification in Audit Committee Practices* (CACP) dari IKAI (2019)
- Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Level 4 dari BNSP (2019)



Periode dan Masa Jabatan

Periode Pertama dengan Masa Jabatan 07 November 2021 - 06 November 2024



Dasar Hukum Pengangkatan

Keputusan Direksi Nomor 1002/DIR/2021 tanggal 8 November 2021 tentang Pengangkatan Sdr. Ignace Widiatmoko sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko



Jabatan Rangkap

Tidak memiliki rangkap jabatan



PAMUJI GESANG RAHARJO

Anggota Komite Pemantau Risiko

Warga Negara Indonesia, berusia 55 tahun, berdomisili di Kota Jakarta Pusat DKI Jakarta



Riwayat Pendidikan

- Sarjana Ekonomi Universitas Dr. Moestopo (1996)
- Magister Manajemen Risiko Universitas Indonesia (2003)
- Doktor bidang Bisnis dan Manajemen (Keuangan) Institut Pertanian Bogor (2014)



Pengalaman Kerja

- General Manager of Risk Management Perum Pegadaian (2010 – 2011);
- Direktur pada Risk Management Center Indonesia (2009 – 2011);
- Anggota Komite Pemantau Risiko PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2007 – 2010 dan 2011 – 2016);
- Anggota Komite Audit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (2016 – 2021);



Sertifikasi

- Certification in Audit Committee Practices (2022);
- Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Level 3 dari BNSP (2021);
- Certified of Investment Market and Banking Analyst (CIMBA) Investment Market and Banking Analyst Association (2014);
- Certified of Financial Consultant (CFC) Institute of Financial Consultant dari IFC (2013);
- Risk Management Certification Level 4 Badan Sertifikasi Manajemen Risiko dari BSMR (2009).



Periode dan Masa Jabatan

Periode Pertama dengan Masa Jabatan: 30 November 2021 - 29 November 2024



Dasar Hukum Pengangkatan

Keputusan Direksi Nomor 1067/DIR/2021 tanggal 1 Desember 2021 tentang Pengangkatan Sdr. Pamuji Gesang Raharjo sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko



Jabatan Rangkap

Tidak memiliki rangkap jabatan

Independensi Komite Pemantau Risiko

Tabel Independensi Komite Pemantau Risiko

Aspek Independensi	Armand B. Arief	Herry Trisaputra Zuna	Himawan Arief Sugoto	Ignace Widiatmoko	Pamuji Gesang Raharjo
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan sebesar 5% atau lebih	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Pemantau Risiko	✓	✓	✓	✓	✓
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah	✓	✓	✓	✓	✓

Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Komite Pemantau Risiko Pada Tahun 2023

Nama	Jabatan	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
Armand B. Arief	Ketua merangkap anggota	Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris		
Herry Trisaputra Zuna	Anggota	Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris		
Himawan Arief Sugoto	Anggota	Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi dapat dilihat pada bagian Pendidikan dan/atau Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris		
Ignace Widiatmoko	Anggota	Webinar OJK - Tren Perbankan di Tahun 2023	17 Januari 2023 melalui Zoom Meeting	OJK
		Kick Off Meeting Profesi Manajemen Risiko "Tantangan dan Peluang Profesi Manajemen Risiko dalam Pencapaian Tujuan Keuangan Berkelanjutan"	03 Maret 2023 melalui Zoom Meeting	IRMAPA
		Webinar OJK - How to Manage Climate Related Risk in Banking Industry	22 Juni 2023 melalui Zoom Meeting	OJK
		Building Resilience in TUNA World	05 Juli 2023 s.d. 06 Juli 2023 di Hotel Tentrem Yogyakarta	YPIA
		Webinar Efektivitas Digital Maturity Assessment Dalam mengukur kematangan transformasi digital perbankan	28 Agustus 2023 melalui Zoom Meeting	FKDKP
		GRC Masterclass Program 2023 "Risk Management Effectiveness Evaluation"	07 September 2023 melalui Zoom Meeting	BSE BUMN
		Board of Commissioner Forum 2023	15 September 2023 s.d. 16 September 2023 di Ayana Hotel Waecicu Beach, Labuan Bajo, NTT	LPPI
		GRC Masterclass Program 2023 "ESG for Boards Governance of ESG"	27 September 2023 melalui Zoom Meeting	BSE BUMN
		Workshop Islamic Banking for Executive	19 Oktober 2023 di Hotel Langham	PEBS FEB UI
Pamuji Gesang Raharjo	Anggota	Webinar OJK - Tren Perbankan di Tahun 2023	17 Januari 2023 melalui Zoom Meeting	OJK
		Kick Off Meeting Profesi Manajemen Risiko "Tantangan dan Peluang Profesi Manajemen Risiko dalam Pencapaian Tujuan Keuangan Berkelanjutan"	03 Maret 2023 melalui Zoom Meeting	IRMAPA
		Webinar OJK - Memperkuat Ketahanan Nasional di Industri Jasa Keuangan	22 Mei 2023 melalui Zoom Meeting	OJK
		Webinar OJK - Membangun Keyakinan Nasabah Aset Digital dan Resiko Siber	30 Mei 2023 melalui Zoom Meeting	OJK
		Webinar LPPI - Anti Money laundering in Digital Era	04 Juni 2023 melalui Zoom Meeting	LPPI
		Webinar OJK - How to Manage Climate Related Risk in Banking Industry	22 Juni 2023 melalui Zoom Meeting	OJK
		Webinar OJK - Mengenal Lebih Jauh Pengaturan UU P2SK Dalam Rangka Penguatan Sektor Perbankan	22 Juni 2023 melalui Zoom Meeting	OJK
		Building Resilience in TUNA World	05 Juli 2023 s.d. 06 Juli 2023 di Hotel Tentrem Yogyakarta	YPIA
		Board of Commissioner Forum 2023	15 September 2023 s.d. 16 September 2023 di Ayana Hotel Waecicu Beach, Labuan Bajo, NTT	LPPI

Nama	Jabatan	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
		Webinar OJK - Peluang <i>Metaverse</i> di Industri Jasa Keuangan	05 November 2023 melalui Zoom Meeting	OJK
		<i>Workshop Islamic Banking for Executive</i>	19 Oktober 2023 di Hotel Langham	PEBS FEB UI
		Seminar LPPI - IRMO 2024 Program <i>Refreshment</i> Manajemen Risiko	27 Oktober 2023 di Auditorium Rachmat Saleh	LPPI

Rapat Komite Pemantau Risiko

KEBIJAKAN RAPAT KOMITE PEMANTAU RISIKO

Rapat Komite Pemantau Risiko dilaksanakan sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan minimal rapat Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank. Rapat Komite Pemantau Risiko dianggap sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota Komite termasuk 1 (satu) orang Komisaris Independen dan 1 (satu) Pihak Independen.

Dalam hal anggota Komite Pemantau Risiko tidak dapat menghadiri rapat secara fisik, maka dapat menghadiri rapat dengan menggunakan surat kuasa, teknologi telekonferensi, dan cara-cara lain yang diperbolehkan sesuai tata cara dan ketentuan perundangan yang berlaku.

Rapat dipimpin oleh ketua Komite atau dalam hal ketua Komite berhalangan hadir, rapat dipimpin oleh anggota komite yang ditunjuk oleh anggota komite yang hadir. Keputusan rapat Komite dilakukan berdasarkan musyawarah dan mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak dengan prinsip 1 (satu) orang 1 (satu) suara (*one man one vote*).

Hasil rapat Komite dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite yang hadir, didokumentasikan dengan baik dan disampaikan kepada Dewan Komisaris. Hasil rapat mencakup waktu dan tempat rapat, agenda rapat peserta yang hadir, topik yang dibahas, perbedaan pendapat (bila ada) dan keputusan rapat. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat Komite wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat.

Komite Pemantau Risiko dapat mengadakan rapat atau pertemuan khusus bila diperlukan. Rapat komite dapat mengundang manajemen atau pihak lain sebagai narasumber. Rapat diselenggarakan berdasarkan undangan dan agenda yang sudah disepakati sebelum rapat dilakukan dan hasil-raport harus tercatat dalam risalah, dokumen yang aslinya disimpan oleh Komite serta salinannya disampaikan kepada Sekretaris Dewan Komisaris dan apabila diperlukan dapat dibagikan kepada undangan yang tidak hadir dalam rapat tersebut.

AGENDA RAPAT KOMITE PEMANTAU RISIKO

Selama tahun 2023, Komite Pemantau Risiko telah menyelenggarakan 52 (lima puluh dua) rapat sehingga telah memenuhi persyaratan penyelenggaraan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. Agenda rapat mencakup pelaksanaan tugas dan tanggung jawab komite sebagai berikut:

Tabel Agenda Rapat Komite Pemantau Risiko

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat
1.	11 Januari 2023	Penyusunan Penilaian Sendiri (<i>Self Assessment</i>) Penerapan Tata Kelola Bank Periode Januari s.d. Desember 2022 - Bagian Komite Pemantau Risiko	- Armand B. Arief - Herry Trisaputra Zuna - Himawan Arief Sugoto - Ignace Widiatmoko - Pamuji Gesang Raharjo
2.	25 Januari 2023	Kajian terhadap Rencana dan Program Strategis Operasional Perseroan	- Armand B. Arief - Herry Trisaputra Zuna - Himawan Arief Sugoto - Ignace Widiatmoko - Pamuji Gesang Raharjo
3.	30 Januari 2023	Penyusunan Laporan Realisasi Kinerja Komite Pemantau Risiko Periode Triwulan IV Tahun 2022 dan Periode Tahun 2022	- Armand B. Arief - Herry Trisaputra Zuna - Himawan Arief Sugoto - Ignace Widiatmoko - Pamuji Gesang Raharjo

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat
4.	6 Februari 2023	Penelaahan terhadap Laporan Kepatuhan Semester II Tahun 2022	• Armand B. Arief • Herry Trisaputra Zuna • Himawan Arief Sugoto • Ignace Widiatmoko • Pamuji Gesang Raharjo
5.	13 Februari 2023	Penelaahan terhadap Profil Risiko, Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM), dan Tingkat Kesehatan Bank (TKB) Posisi Desember 2022	• Armand B. Arief • Herry Trisaputra Zuna • Himawan Arief Sugoto • Ignace Widiatmoko • Pamuji Gesang Raharjo
6.	20 Februari 2023	Penelaahan terhadap Laporan Keputusan Rapat Komite Kredit periode Desember 2022	• Armand B. Arief • Herry Trisaputra Zuna • Himawan Arief Sugoto • Ignace Widiatmoko • Pamuji Gesang Raharjo
7.	21 Februari 2023	Kajian terhadap Proyeksi <i>Loan at Risk</i> (LAR) Tahun 2023	• Armand B. Arief • Herry Trisaputra Zuna • Himawan Arief Sugoto • Ignace Widiatmoko • Pamuji Gesang Raharjo
8.	27 Februari 2023	Penelaahan terhadap Laporan Keputusan Rapat Komite Kredit periode Januari 2023	• Armand B. Arief • Herry Trisaputra Zuna • Himawan Arief Sugoto • Ignace Widiatmoko • Pamuji Gesang Raharjo
9.	15 Maret 2023	Kajian atas Permohonan Prinsip Pemberian Kredit Konsumer kepada Pihak Terkait	• Armand B. Arief • Herry Trisaputra Zuna • Himawan Arief Sugoto • Ignace Widiatmoko • Pamuji Gesang Raharjo
10.	3 April 2023	Penelaahan terhadap Laporan Keputusan Rapat Komite Kredit periode Februari 2023	• Armand B. Arief • Herry Trisaputra Zuna • Himawan Arief Sugoto • Ignace Widiatmoko • Pamuji Gesang Raharjo
11.	10 April 2023	Kajian atas Permohonan Prinsip Pemberian Kredit atau Pembiayaan kepada Pejabat Eksekutif	• Armand B. Arief • Herry Trisaputra Zuna • Himawan Arief Sugoto • Ignace Widiatmoko • Pamuji Gesang Raharjo
12.	2 Mei 2023	Penyusunan Laporan Realisasi Kinerja Komite Pemantau Risiko Periode Triwulan I Tahun 2023	• Armand B. Arief • Herry Trisaputra Zuna • Himawan Arief Sugoto • Ignace Widiatmoko • Pamuji Gesang Raharjo
13.	10 Mei 2023	Kajian atas Permohonan Prinsip Pemberian Kredit atau Pembiayaan kepada Pejabat Eksekutif	• Armand B. Arief • Herry Trisaputra Zuna • Himawan Arief Sugoto • Ignace Widiatmoko • Pamuji Gesang Raharjo
14.	10 Mei 2023	Penelaahan terhadap Laporan Kepatuhan Triwulan I Tahun 2023	• Armand B. Arief • Himawan Arief Sugoto • Ignace Widiatmoko • Pamuji Gesang Raharjo
15.	17 Mei 2023	Reviu Parameter dan Limit Profil Risiko Bank	• Armand B. Arief • Ignace Widiatmoko • Pamuji Gesang Raharjo
16.	5 Juni 2023	Penelaahan terhadap Laporan Keputusan Rapat Komite Kredit periode Maret s.d. April 2023	• Armand B. Arief • Herry Trisaputra Zuna • Himawan Arief Sugoto • Ignace Widiatmoko • Pamuji Gesang Raharjo
17.	6 Juni 2023	Keandalan dan Keamanan Teknologi Informasi	• Armand B. Arief • Ignace Widiatmoko • Pamuji Gesang Raharjo

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat
18.	19 Juni 2023	Penelaahan Terhadap Laporan Pelaksanaan Hapus Buku Kredit atau Pembiayaan Periode Januari s.d. April 2023	- Armand B. Arief - Herry Trisaputra Zuna - Himawan Arief Sugoto - Ignace Widiatmoko - Pamuji Gesang Raharjo
19.	21 Juni 2023	Penelaahan terhadap Usulan Perubahan Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2023—2025 dan Perubahan Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2023	- Armand B. Arief - Herry Trisaputra Zuna - Himawan Arief Sugoto - Ignace Widiatmoko - Pamuji Gesang Raharjo
20.	05 Juli 2023	Progres Implementasi Arsitektur Kebijakan Baru	- Armand B. Arief - Himawan Arief Sugoto - Ignace Widiatmoko - Pamuji Gesang Raharjo
21.	10 Juli 2023	Penelaahan terhadap Laporan Keputusan Rapat Komite Kredit periode Mei 2023	- Armand B. Arief - Herry Trisaputra Zuna - Himawan Arief Sugoto - Ignace Widiatmoko - Pamuji Gesang Raharjo
22.	12 Juli 2023	Rekomendasi terhadap Laporan Rapat Tinjauan Manajemen ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)	- Armand B. Arief - Herry Trisaputra Zuna - Himawan Arief Sugoto - Ignace Widiatmoko - Pamuji Gesang Raharjo
23.	13 Juli 2023	Reviu terhadap <i>Threshold Risk Tolerance</i> pada Rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga	- Armand B. Arief - Ignace Widiatmoko - Pamuji Gesang Raharjo
24.	24 Juli 2023	Penyusunan Penilaian Sendiri (<i>Self Assessment</i>) Penerapan Tata Kelola Bank Periode Januari s.d. Juni 2023 - Bagian Komite Pemantau Risiko	- Armand B. Arief - Herry Trisaputra Zuna - Himawan Arief Sugoto - Ignace Widiatmoko - Pamuji Gesang Raharjo
25.	26 Juli 2023	Penelaahan terhadap Laporan Keputusan Rapat Komite Kredit periode Juni 2023	- Armand B. Arief - Herry Trisaputra Zuna - Himawan Arief Sugoto - Ignace Widiatmoko - Pamuji Gesang Raharjo
26.	27 Juli 2023	Pembahasan Proses Bisnis Kredit Komersial	- Armand B. Arief - Ignace Widiatmoko - Pamuji Gesang Raharjo
27.	01 Agustus 2023	Penelaahan terhadap Laporan Kepatuhan Triwulan II dan Semester I Tahun 2023	- Armand B. Arief - Herry Trisaputra Zuna - Himawan Arief Sugoto - Ignace Widiatmoko - Pamuji Gesang Raharjo
28.	08 Agustus 2023	Penelaahan terhadap Profil Risiko, Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM), dan Tingkat Kesehatan Bank (TKB) Posisi Juni 2023	- Armand B. Arief - Herry Trisaputra Zuna - Himawan Arief Sugoto - Ignace Widiatmoko - Pamuji Gesang Raharjo
29.	24 Agustus 2023	Penyusunan Laporan Realisasi Kinerja Komite Pemantau Risiko Periode Triwulan II Tahun 2023	- Armand B. Arief - Herry Trisaputra Zuna - Himawan Arief Sugoto - Ignace Widiatmoko - Pamuji Gesang Raharjo
30.	28 Agustus 2023	Penelaahan terhadap Laporan Keputusan Rapat Komite Kredit periode Juli 2023	- Armand B. Arief - Herry Trisaputra Zuna - Himawan Arief Sugoto - Ignace Widiatmoko - Pamuji Gesang Raharjo
31.	4 September 2023	Rekomendasi atas Informasi <i>Source Code</i> Aplikasi Sigma Syariah	- Armand B. Arief - Herry Trisaputra Zuna - Himawan Arief Sugoto - Ignace Widiatmoko - Pamuji Gesang Raharjo

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat
32.	6 September 2023	Rekomendasi atas Penginian Ketetapan Direksi tentang Kebijakan Umum Pengelolaan Perusahaan Anak dan Unit Usaha Syariah	• Armand B. Arief • Herry Trisaputra Zuna • Himawan Arief Sugoto • Ignace Widiatmoko • Pamuji Gesang Raharjo
33.	12 September 2023	Kajian terhadap Proyeksi Kualitas Kredit dan Pembiayaan Tahun 2023	• Armand B. Arief • Herry Trisaputra Zuna • Himawan Arief Sugoto • Ignace Widiatmoko • Pamuji Gesang Raharjo
34.	12 September 2023	Rekomendasi atas Penginian Ketetapan Direksi tentang Kebijakan Umum Hukum, Kepatuhan, APU, PPT, dan PPSPM, serta Tata Kelola Perusahaan	• Armand B. Arief • Herry Trisaputra Zuna • Himawan Arief Sugoto • Ignace Widiatmoko • Pamuji Gesang Raharjo
35.	18 September 2023	Rekomendasi atas Informasi Ketidaklengkapan Data Nasabah	• Armand B. Arief • Herry Trisaputra Zuna • Himawan Arief Sugoto • Ignace Widiatmoko • Pamuji Gesang Raharjo
36.	25 September 2023	Rekomendasi atas Peraturan Direksi tentang Kebijakan Khusus Prosedur Kerja Sama dengan Mitra	• Armand B. Arief • Herry Trisaputra Zuna • Himawan Arief Sugoto • Ignace Widiatmoko • Pamuji Gesang Raharjo
37.	27 September 2023	Penelaahan terhadap Laporan Keputusan Rapat Komite Kredit Periode Agustus 2023	• Armand B. Arief • Herry Trisaputra Zuna • Himawan Arief Sugoto • Ignace Widiatmoko • Pamuji Gesang Raharjo
38.	9 Oktober 2023	Rekomendasi atas Penginian Ketetapan Direksi tentang Kebijakan Umum Manajemen Risiko	• Armand B. Arief • Herry Trisaputra Zuna • Himawan Arief Sugoto • Ignace Widiatmoko • Pamuji Gesang Raharjo
39.	16 Oktober 2023	Pembahasan Hasil Temuan dan Rekomendasi terhadap Tata Kelola Data Center Sentul dan Data Recovery Center Surabaya	• Armand B. Arief • Herry Trisaputra Zuna • Himawan Arief Sugoto • Ignace Widiatmoko • Pamuji Gesang Raharjo
40.	30 Oktober 2023	Penelaahan terhadap Laporan Keputusan Rapat Komite Kredit Periode September 2023	• Armand B. Arief • Herry Trisaputra Zuna • Himawan Arief Sugoto • Ignace Widiatmoko • Pamuji Gesang Raharjo
41.	31 Oktober 2023	Penyusunan Laporan Realisasi Kinerja Komite Pemantau Risiko Periode Triwulan III Tahun 2023	• Armand B. Arief • Herry Trisaputra Zuna • Himawan Arief Sugoto • Ignace Widiatmoko • Pamuji Gesang Raharjo
42.	14 November 2023	Rekomendasi atas Penginian Risk Appetite dan Risk Tolerance Tahun 2024	• Armand B. Arief • Herry Trisaputra Zuna • Himawan Arief Sugoto • Ignace Widiatmoko • Pamuji Gesang Raharjo
43.	20 November 2023	Rekomendasi atas Rencana Bisnis Bank Tahun 2024-2026 dan Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan Tahun 2024	• Armand B. Arief • Herry Trisaputra Zuna • Himawan Arief Sugoto • Ignace Widiatmoko • Pamuji Gesang Raharjo
44.	23 November 2023	Penelaahan terhadap Laporan Keputusan Rapat Komite Kredit Periode Oktober 2023	• Armand B. Arief • Herry Trisaputra Zuna • Himawan Arief Sugoto • Ignace Widiatmoko • Pamuji Gesang Raharjo

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat
45.	27 November 2023	Rekomendasi atas Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Tahun 2024	- Armand B. Arief - Herry Trisaputra Zuna - Himawan Arief Sugoto - Ignace Widiatmoko - Pamuji Gesang Raharjo
46.	28 November 2023	Rekomendasi atas Penginian Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>) Tahun 2024	- Armand B. Arief - Herry Trisaputra Zuna - Himawan Arief Sugoto - Ignace Widiatmoko - Pamuji Gesang Raharjo
47.	1 Desember 2023	Rekomendasi atas Penginian Kebijakan Khusus tentang Prosedur Penerapan Program APU, PPT, & PPPSPM dan Petunjuk Teknis tentang Pelaksanaan Program APU, PPT, & PPPSPM	- Armand B. Arief - Herry Trisaputra Zuna - Himawan Arief Sugoto - Ignace Widiatmoko - Pamuji Gesang Raharjo
48.	4 Desember 2023	Penelaahan terhadap Laporan Keputusan Rapat Komite Kredit Periode Oktober 2023	- Armand B. Arief - Herry Trisaputra Zuna - Himawan Arief Sugoto - Ignace Widiatmoko - Pamuji Gesang Raharjo
49.	6 Desember 2023	Rekomendasi terhadap Laporan Rapat Tinjauan Manajemen ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)	- Armand B. Arief - Herry Trisaputra Zuna - Himawan Arief Sugoto - Ignace Widiatmoko - Pamuji Gesang Raharjo
50.	11 Desember 2023	Penyusunan Penginian Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko	- Armand B. Arief - Herry Trisaputra Zuna - Himawan Arief Sugoto - Ignace Widiatmoko - Pamuji Gesang Raharjo
51.	13 Desember 2023	Penyusunan Program Kerja Komite Pemantau Risiko Tahun 2024	- Armand B. Arief - Herry Trisaputra Zuna - Himawan Arief Sugoto - Ignace Widiatmoko - Pamuji Gesang Raharjo
52.	27 Desember 2023	Kajian atas Permohonan Prinsip Pemberian Kredit atau Pembiayaan kepada Pejabat Eksekutif	- Armand B. Arief - Herry Trisaputra Zuna - Himawan Arief Sugoto - Ignace Widiatmoko - Pamuji Gesang Raharjo

FREKUENSI DAN TINGKAT KEHADIRAN RAPAT KOMITE PEMANTAU RISIKO

Tabel Tingkat Kehadiran Rapat Komite Pemantau Risiko

Nama	Jabatan	Rapat Komite Pemantau Risiko		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase
Armand B. Arief	Ketua merangkap Anggota	52	52	100%
Herry Trisaputra Zuna	Anggota	52	46	88,5%
Himawan Arief Sugoto	Anggota	52	48	92,3%
Ignace Widiatmoko	Anggota	52	52	100%
Pamuji Gesang Raharjo	Anggota	52	52	100%

Program Kerja dan Pelaksanaan Tugas Komite Pemantau Risiko Tahun 2023

Dalam tahun 2023, Komite telah merealisasikan program kerja yang telah disusun pada tahun sebelumnya. Sebagian besar program kerja telah dilaksanakan namun terdapat beberapa program kerja yang tidak dilaksanakan dikarenakan tidak terdapat kebutuhan mendesak dan/atau inisiasi dari satuan kerja terkait mengalami penundaan. perincian atas program kerja dan realisasi pelaksanaan disampaikan sebagai berikut:

No	Rencana Kerja	Pelaksanaan	Keterangan
1 REGULER			
a	Penelaahan Laporan Profil Risiko	Terlaksana	-
b	Penelaahan Laporan Tingkat Kesehatan Bank	Terlaksana	-
c	Penyampaian revidu dan masukan terkait <i>Risk Appetite</i> dan <i>Risk Tolerance</i>	Terlaksana	-
d	Penelaahan Rencana Bisnis Bank (RBB) dan Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan (RKAP)	Terlaksana	-
e	Penelaahan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB)	Terlaksana	-
f	Penelaahan Penginian <i>Recovery Plan</i>	Terlaksana	-
g	Penelaahan Penginian <i>Resolution Plan</i>	Tidak Terlaksana	<i>Resolution plan</i> secara berkala dikinikan setiap 2 (dua) tahun sekali, pada tahun 2023 tidak terdapat kondisi signifikan yang membutuhkan penginian <i>resolution plan</i> .
h	Pengkajian ulang terhadap Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko (PKMR)	Terlaksana	-
i	Penelaahan terhadap Laporan Kepatuhan	Terlaksana	-
j	Penyampaian Laporan Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola Bank	Terlaksana	-
2 Non-Reguler			
a	Inisiasi Strategis dan Regulasi Baru		
	Revidu <i>Early Warning System</i> Kredit Komersial	Tidak Terlaksana	Belum terdapat inisiasi dari satuan kerja terkait
	Revidu Scoring Model SME	Tidak Terlaksana	Belum terdapat inisiasi dari satuan kerja terkait
b	Rekomendasi Kebijakan Umum dan Khusus:		
	Kebijakan Khusus APU-PPT	Terlaksana	-
	Kebijakan Khusus Prosedur Kerja Sama Mitra	Terlaksana	-
	Kebijakan Umum Manajemen Risiko	Terlaksana	-
	Kebijakan Umum Perkreditan	Tidak Terlaksana	Kebijakan perkreditan atau pembiayaan secara berkala dilakukan revidu setiap 2 (dua) tahun sekali, pada tahun 2023 tidak terdapat kondisi signifikan yang menyebabkan kebijakan tersebut direvidu dan/atau dikinikan.
	Kebijakan Khusus Tata Kelola Terintegrasi	Tidak Terlaksana	Sehubungan dengan belum terdapatnya grup usaha Perseroan, maka penyusunan kebijakan ini akan dilakukan pada tahun berikutnya.

No	Rencana Kerja	Pelaksanaan	Keterangan
3	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Komite		
	Melakukan komunikasi dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko	Terlaksana	-
4	Pembahasan <i>Top Risk</i> Pada <i>Risk Taking Unit</i>		
	Meminta penjelasan kepada Satuan Kerja Manajemen Risiko	Terlaksana	-
5	Tugas Khusus & Lain-Lain		
a	Rapat Komite Pemantau Risiko	Terlaksana	-
b	Tugas lain dari Ketua Komite/Dewan Komisaris	Terlaksana	-

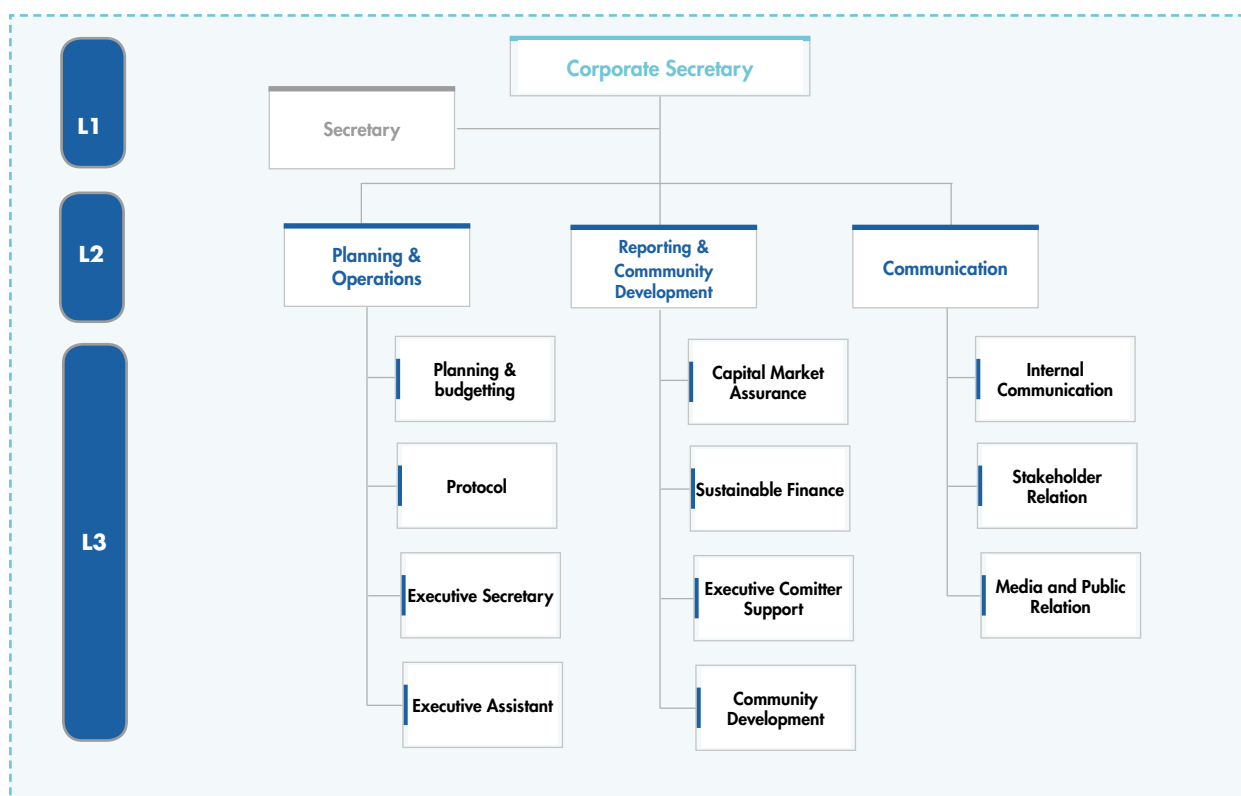
Organ dan Komite di Bawah Direksi

Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan sebagai organ pendukung Direksi dalam implementasi tata kelola perusahaan yang baik, memiliki peran penting dalam memastikan bahwa Perseroan mematuhi peraturan terkait persyaratan keterbukaan sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip GCG serta memenuhi tanggung jawab Perseroan terkait penyampaian informasi yang material dan relevan kepada stakeholders. Selain itu, Sekretaris Perusahaan memberikan informasi yang dibutuhkan Direksi dan Dewan Komisaris serta mengorganisasikan, mengoordinasikan dan mendokumentasikan Rapat Direksi, Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris, RUPS, dan kegiatan lainnya dengan *stakeholders*.

Struktur Sekretaris Perusahaan

Organ Sekretaris Perusahaan dijalankan oleh Corporate Secretary Division (CSD) yang dipimpin oleh Corporate Secretary Division Head (dhi. Sekretaris Perusahaan) dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama atas pelaksanaan tugasnya. Sekretaris Perusahaan dibantu oleh Senior Manager/Assistant Vice President yang bertanggung jawab atas masing-masing unit kerja diantaranya Planning & Operations, Reporting & Community Development, dan Communication.



Fungsi, Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Sekretaris Perusahaan juga mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik. Berdasarkan peraturan tersebut, Sekretaris Perusahaan Perseroan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain:

1. Mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
 - a. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs web emiten atau perusahaan publik.
 - b. Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu.
 - c. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham.
 - d. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
 - e. Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
4. Sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham emiten atau perusahaan publik, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya.

Profil Sekretaris Perusahaan

Periode 1 Januari – 13 April 2023



ACHMAD CHAERUL

Sekretaris Perusahaan

Warga Negara Indonesia, berusia 53 tahun per Desember 2023, berdomisili di Kota Bekasi



Riwayat Pendidikan

- Sarjana (S1) Hukum dari Universitas Sriwijaya (1995)
- Magister (S2) Ilmu Hukum dari Universitas Indonesia (2002)



Pengalaman Kerja

Memulai karir di PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sejak tahun 1997 dan pernah menjabat sebagai Kepala Cabang Pekanbaru (2015), Kepala Cabang Makassar (2016), Regional Office V Head (2017), Corporate Secretary Division Head (2018) dan Service Quality and Distribution Division Head (2020).



Sertifikasi

- Kompetensi Manajemen Risiko Level 4 – Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan
- Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko – PT Raharja Duta Solusindo



Periode Menjabat

Periode menjabat 11 Juli 2022 - 13 April 2023



Dasar Hukum Pengangkatan

Surat Keputusan Nomor 711/DIR/2022 tanggal 11 Juli 2022

Periode April 2023 – saat ini



RAMON ARMANDO

Sekretaris Perusahaan

Warga Negara Indonesia, 49 tahun per Desember 2023, berdomisili di Kota Jakarta



Riwayat Pendidikan

- Ilmu Sosial/Administrasi dari Universitas Indonesia (1996)
- Magister (S-2) Perdagangan dari The University of Sydney (1998)



Pengalaman Kerja

Memulai karir di PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk pada tahun 2020 sebagai Marketing Communication Division Head dan merangkap sebagai Digital Channel Division Head. Pernah menjabat di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai DH Retail Marketing (2015), DH Corporate Communication (2010), dan Regional Card Manager Bandung (2009).



Sertifikasi

Kompetensi Manajemen Risiko Level 5



Periode Menjabat

Sejak 14 April 2023



Dasar Hukum Pengangkatan

Surat Keputusan Direksi Nomor 231/DIR/2023 tanggal 14 April 2023

Program Peningkatan Kompetensi Sekretaris Perusahaan

Nama	Jabatan	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi /Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
Achmad Chaerul*	Sekretaris Perusahaan	Internalisasi BTN Mobile (<i>Managerial</i>)	Jakarta, 16 Januari 2023	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
		Internalisasi Security Awareness Pengelolaan User ID dan Password	Jakarta, 03 Februari 2023	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
		Compliance Excellence Edisi Februari 2023 Kebijakan Sistem Management Anti Penyuapan (SMAP) (<i>Managerial</i>)	Jakarta, 06 Februari 2023	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
		Sosialisasi Sadar Risiko Hukum	Jakarta, 15 Maret 2023	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
		Compliance Excellence Edisi April 2023 - Know Your Employee (<i>Managerial</i>)	Jakarta, 04 April 2023	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Ramon Armando**	Sekretaris Perusahaan	Internalisasi Security Awareness Pengelolaan User ID dan Password	Jakarta, 03 Februari 2023	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
		Compliance Excellence Edisi Februari 2023 Kebijakan Sistem Management Anti Penyuapan (SMAP) (<i>Managerial</i>)	Jakarta, 06 Februari 2023	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
		Sosialisasi Sadar Risiko Hukum	Jakarta, 15 Maret 2023	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
		Compliance Excellence Edisi April 2023 - Know Your Employee (<i>Managerial</i>)	Jakarta, 04 April 2023	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
		BTN Leadership Forum 2023	Semarang, 12 – 13 Mei 2023	Korn Ferry
		Compliance Excellence Edisi Juni 2023 - Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa (<i>Managerial</i>)	Jakarta, 07 – 22 Juni 2023	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
		Compliance Excellence Edisi Juli 2023 - Data Privacy Awareness (<i>Managerial</i>)	Jakarta, 10 Juli 2023	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
		Internalisasi Tata Kelola Perusahaan (GCG) dan Code of Conduct	Jakarta, 17 Juli 2023	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Nama	Jabatan	Jenis Pelatihan dan Materi Pengembangan Kompetensi / Pelatihan	Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Penyelenggara
		Sosialisasi Implementasi Petunjuk Teknis Fraud Risk Assessment (FRA)	Jakarta, 20 Juli 2023	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
		Internalisasi Manajemen Risiko TI, Digital dan Siber 2023	Jakarta, 21 Agustus 2023	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
		Internalisasi Know Your Employee (KYE)	Jakarta, 01 September 2023	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
		Internalisasi PPDigital serta Kebijakan dan Prosedur Baru BTN	Jakarta, 05 September 2023	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
		Compliance Excellence Edisi September 2023 - Virtual Branch & Online Onboarding for Open Account (Managerial)	Jakarta, 11 September 2023	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
		AGLP "Leading Innovation in Global Econo	Chicago, USA, 18 – 22 September 2023	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
		Anti Money Laundering (AMOLA) AMOLA Mini Series Episode 3 Tahun 2023	Jakarta, 02 Oktober 2023	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
		Compliance Excellence Edisi Oktober 2023 - Produk KRING BTN Pra Pensiun dan Pensiunan (Managerial)	Jakarta, 04 Oktober 2023	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
		Internalisasi Campaign Program Road Map & Inisiatif Strategis Human Capital 2023 – 2025	Jakarta, 16 Oktober 2023	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
		Internalisasi Kebijakan Standar Layanan Outlet Bank BTN	Jakarta, 01 November 2023	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
		Compliance Excellence Edisi November 2023 - Limitasi Kewenangan Penyetoran dan Pengambilan Dana serta Layanan Pick Up Service (Managerial)	Jakarta, 06 November 2023	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
		Internalisasi Podcast Legal Clinic Live Session Tahun 2023	Jakarta, 15 November 2023	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
		Internalisasi Strategic Business Unit (SBU)	Jakarta, 01 Desember 2023	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
		Pembekalan dan Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 5	Jakarta, 6 - 7 Desember 2023	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
		Internalisasi Peraturan Internal Baru Kebijakan Umum Manajemen Risiko	Jakarta, 19 Desember 2023	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

*Berhenti menjabat sejak 13 April 2023.

**Mulai menjabat sejak 14 April 2023.

Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan Tahun 2023

Sepanjang tahun 2023, Sekretaris Perusahaan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- Penyampaian Perkembangan Pasar Modal kepada Direksi dan Dewan Komisaris salah satunya dengan penyampaian informasi adanya peraturan dan ketentuan terbaru di bidang pasar modal yang harus dijalankan oleh Perseroan. Beberapa peraturan baru yang disosialisasikan dan diinternalisasi dalam peraturan internal oleh Sekretaris Perusahaan adalah:
 - Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-1/MBU/03/2023 Tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara
 - Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.
 - Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-3/MBU/03/2023 Tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara
 - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
- Program komunikasi kepada komunitas pasar modal bersama dengan Investor Relations. Metode yang digunakan adalah sebagai berikut:
 - Direct, melalui Rapat Umum Pemegang Saham dan Public Expose.
 - Indirect, melalui Annual Report, Publikasi Laporan Keuangan, dan Press Release.
 - Keterbukaan Informasi kepada antara lain pemegang saham, regulator terkait, dan/atau masyarakat.
- Pemenuhan kewajiban keterbukaan Informasi sebagaimana yang diatur antara lain dalam:
 - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 8/POJK.04/2015 tanggal 25 Juni 2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik,

- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik,
- c. Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00066/BEI/09-2022 Tentang Perubahan Peraturan Nomor I-E Tentang Kewajiban Penyampaian Informasi,

Selama tahun 2023, Sekretaris Perusahaan telah menyampaikan keterbukaan informasi kepada OJK/ Bursa sebanyak 9 (sembilan) laporan. Semua laporan tersebut disampaikan dalam tenggat waktu sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu paling lambat akhir kerja ke-2 (kedua) setelah keputusan atau terdapatnya informasi atau fakta material yang mungkin dapat mempengaruhi nilai efek perusahaan atau keputusan investasi pemodal. Selain laporan keterbukaan informasi tersebut di atas, Sekretaris Perusahaan juga mengoordinasi penyampaian penjelasan apabila terdapat pertanyaan atau permintaan dari Bursa mengenai pemberitaan yang terkait dengan Perseroan. Sesuai dengan Peraturan Bursa No. I-E, Perusahaan Tercatat wajib memberikan tanggapan tertulis atas hal-hal yang dipertanyakan Bursa, selambat-lambatnya 1 (satu) hari Bursa setelah diterimanya permintaan penjelasan dari Bursa baik yang disampaikan oleh Bursa melalui faksimili atau media pengiriman lainnya. Selama tahun 2023, Perseroan menerima 7 (tujuh) kali permintaan penjelasan dari Bursa dan OJK.

4. Peningkatan Akses Informasi kepada Publik
Perseroan senantiasa memberikan kemudahan bagi *stakeholders* dan/atau masyarakat (publik) untuk mengakses informasi dan melakukan komunikasi dengan *stakeholders* menggunakan kebijakan satu pintu (*one door policy*) yang dibantu koordinasinya oleh Sekretaris Perusahaan. Perseroan juga meningkatkan kualitas penyampaian informasi kepada publik dengan menyediakan layanan Keterbukaan Informasi Publik pada situs web Perseroan, dalam rangka memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tanggal 30 April 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 - b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 61 Tahun 2010 tanggal 23 Agustus 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 - c. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tanggal 7 Juni 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Selain publikasi melalui situs web Perseroan, publik juga dapat mengakses informasi mengenai Perseroan melalui media massa, serta media sosial yang terdiri dari facebook, twitter, youtube dan instagram yang dikelola bersama dengan Marketing Communication Division.

5. Hubungan dengan Media dan Akses Informasi
Sekretaris Perusahaan selalu berupaya untuk menjalin hubungan baik dengan media massa, baik media elektronik (TV, radio), media cetak (surat kabar, majalah) dan media online. Selama tahun 2023, Sekretaris Perusahaan telah menerbitkan *press release* dan berita foto yang memiliki nilai berita bagi Perseroan, yaitu mengenai perkembangan kinerja, bisnis, TJSL dan operasional Perseroan kurang lebih sebanyak 187 (seratus delapan puluh tujuh) pemberitaan yang terdiri dari 102 (seratus dua) *press release* dan 85 (delapan puluh lima) berita foto.
6. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
Sekretaris Perusahaan mengoordinasikan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. Selama tahun 2023, Perseroan menyelenggarakan 2 (satu) kali RUPS, yaitu RUPS Luar Biasa tanggal 11 Januari 2023 dan RUPS Tahunan tanggal 16 Maret 2023. Seluruh tahapan RUPS telah dijalankan sesuai dengan POJK tersebut di atas dan Anggaran Dasar Perseroan, termasuk di dalamnya pemberitahuan, pengumuman dan pemanggilan RUPS serta penyampaian risalah dan berita acara RUPS.
7. Penyelenggaraan dan Dokumentasi Rapat Direksi dan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris, meliputi:
 - a. Menerima usulan agenda dan materi yang akan diputuskan dalam Rapat Direksi dan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris dari Divisi/Desk/unit kerja lainnya.
 - b. Memastikan penyampaian materi, kuorum dan pengambilan keputusan Rapat Direksi dan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - c. Membuat risalah yang ditandatangani oleh Direksi yang hadir terhadap Rapat Direksi dan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris yang diinisiasi oleh Direksi.
 - d. Mengadministrasikan risalah Rapat Direksi. Menyampaikan keputusan Rapat Direksi dan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris kepada Divisi/Desk/unit kerja terkait untuk dapat segera ditindaklanjuti.

Selama tahun 2023, Sekretaris Perusahaan telah mengoordinasikan penyelenggaraan rapat sebanyak 255 (dua ratus lima puluh lima) kali Rapat Direksi dan 6 (enam) kali Rapat Dewan Komisaris mengundang Direksi serta 6 (enam) kali rapat Direksi mengundang Dewan Komisaris.

8. Penyelenggaraan Program Orientasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris baru yaitu Bapak Oni Febriarto Rahardjo, Bapak Hakim Putratama, dan Bapak Mohamad Yusuf Permana.

PELAKSANAAN TUGAS SEKRETARIS PERUSAHAAN SEBAGAI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

Kebijakan Layanan Informasi Publik

Perseroan sebagai Badan Publik melaksanakan keterbukaan informasi publik sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik.

Sebagai komitmen dukungan untuk mewujudkan layanan informasi publik yang inklusif dalam melaksanakan UU KIP, Perseroan telah menerbitkan kebijakan mengenai Tata Cara Permintaan Informasi dan Penyampaian Informasi Publik yang dituangkan dalam ketentuan sebagai berikut:

1. Kebijakan Khusus PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Nomor 9-AD tentang Operasional Aktivitas Sekretaris Perusahaan Bab IX Tata Cara Penyampaian Informasi Publik.
2. Petunjuk Teknis PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Nomor 9-AD tentang Penyampaian Informasi Kepada Publik.

Layanan Informasi Publik

Sebagaimana Visi dan Misi PPID BTN, maka Perseroan menyelenggarakan layanan informasi publik yang inklusif dengan cara memastikan bahwa informasi yang disediakan dapat diakses oleh semua orang, termasuk bagi penyandang disabilitas yang mempertimbangkan faktor aksesibilitas, bahasa dan kebutuhan khusus pengguna, dengan menyediakan sarana prasarana, sumber daya manusia dan anggaran yang dirincikan sebagai berikut:

A. Sarana Prasarana

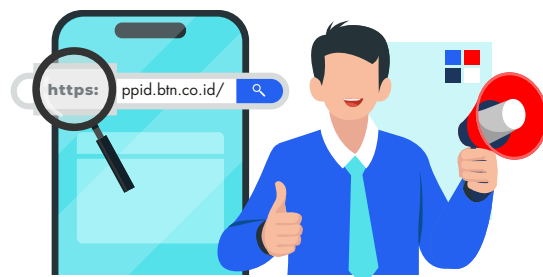
PPID Pusat beroperasi di Kantor Pusat Perseroan yang bertempat di Menara BTN Jakarta. PPID Pusat dibantu oleh Petugas Pelayanan Informasi Publik yang berada di Kantor Cabang seluruh Indonesia. Maka, untuk menunjang layanan informasi yang inklusif pada PPID BTN, Perseroan telah menyiapkan berbagai layanan informasi baik secara digital maupun non digital sebagai berikut:

1. Layanan Informasi Berbasis *Digital*

Dalam dunia modern saat ini, optimalisasi teknologi sangat penting untuk akses informasi menjadi lebih dinamis dan fleksibel, sehingga Perseroan berinisiasi menyediakan wadah bagi masyarakat memperoleh informasi secara *online* melalui *website* PPID dan aplikasi android maupun iOS BTN PPID.

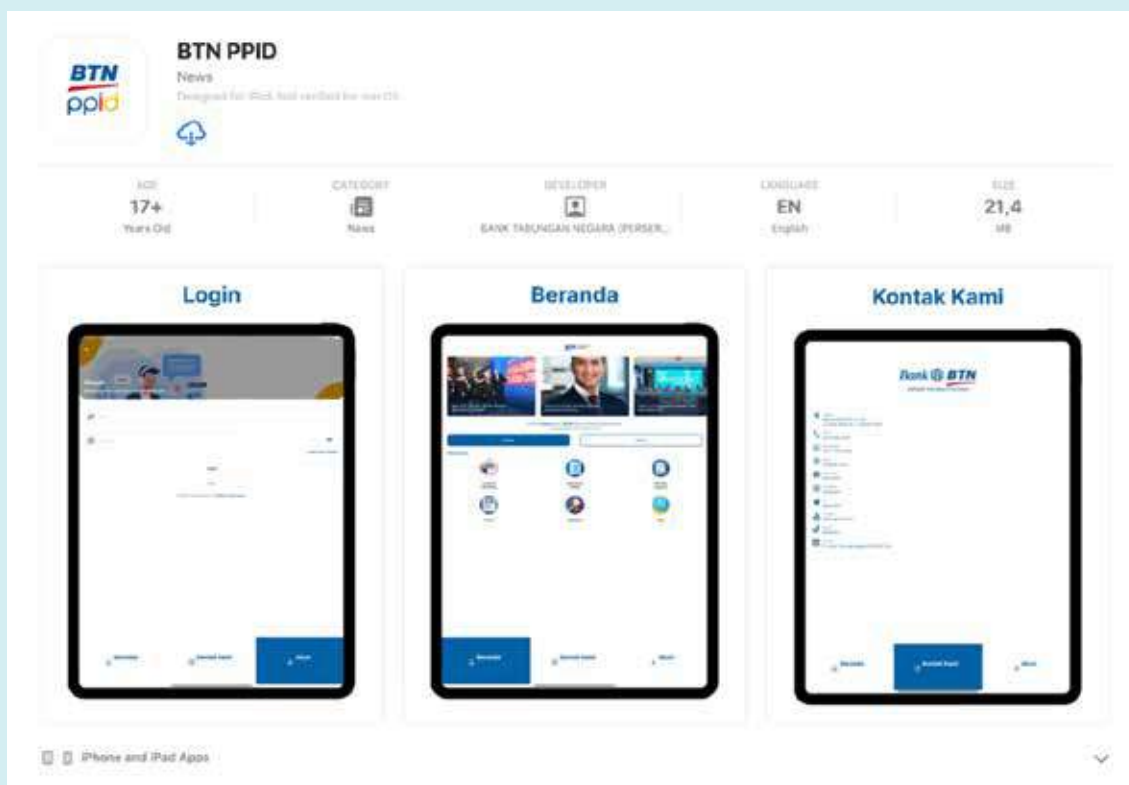
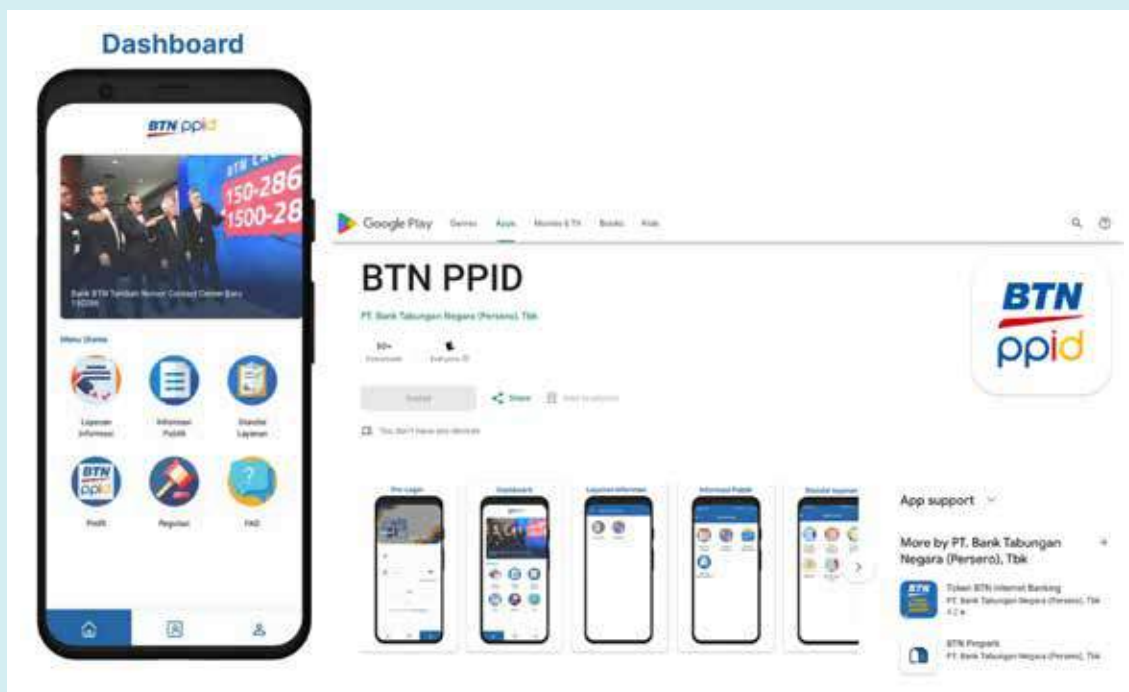
• Website BTN PPID

Perseroan menyiapkan sarana untuk mengakses informasi secara online melalui *website* BTN PPID <https://ppid.btn.co.id/>. Permohonan Informasi Publik dapat dilakukan dengan mudah dengan mengisi registrasi secara *online* di *website* tersebut. Selain itu, informasi-informasi publik yang bersifat wajib, berkala dan serta merta termasuk berita-berita terkini terkait perseroan juga dapat diakses melalui *website* BTN PPID.



- Aplikasi *Mobile* BTN PPID

Seiring dengan perkembangan teknologi, pelayanan informasi publik dapat juga diberikan melalui aplikasi *mobile* BTN PPID yang telah dapat diunduh melalui Google Play Store dan Apps Store. Masyarakat dapat mengakses melalui gawai atau *smartphone* dengan jaringan internet di mana saja.



2. Layanan Informasi Non Digital

Perseroan menyediakan ruangan untuk masyarakat yang datang langsung/tatap muka untuk mengajukan permintaan informasi publik. Ruang Pelayanan Informasi Publik bertempat di Lantai 20 Menara BTN Jalan Gajah Mada Nomor 1 Jakarta Pusat dan Kantor Cabang terdekat PPID Pusat.



Salah satu ruang informasi publik di Kantor Cabang:



3. Layanan Informasi Penunjang Lainnya

Seiring dengan kesetaraan kemudahan dalam perolehan informasi, penyandang disabilitas juga menjadi perhatian utama Perseroan, hal ini dilakukan dengan menyediakan fasilitas penunjang seperti jalur jalan dan kursi roda khusus serta pendampingan perolehan informasi oleh petugas layanan. Selain itu, untuk menunjang pelayanan terhadap penyandang disabilitas, diberikan pelatihan dasar komunikasi difabel kepada customer service kantor cabang.

Akses Jalur Jalan Penyandang Disabilitas di salah satu kantor cabang:



B. Sumber Daya Manusia

PPID Pusat yang bertempat di Kantor Pusat Bank BTN berjumlah 3 (tiga) orang yang merupakan pegawai organik Bank BTN. Sedangkan, Petugas Pelayanan Informasi Publik yang bertugas di seluruh Kantor Cabang Bank BTN merupakan pegawai organik yang juga menjabat sebagai Customer Service.

Penguatan SDM layanan informasi publik juga dilakukan oleh Perseroan dalam rangka meningkatkan wawasan dan kompetensi yang bertujuan untuk memberikan layanan terbaik bagi masyarakat khususnya penyandang disabilitas dalam mendapatkan informasi publik. Perseroan memberikan pelatihan dasar komunikasi difabel untuk petugas pelayanan informasi publik (dhi. Customer Service) di Kantor Cabang.

C. Anggaran Layanan Informasi

Perseroan mengalokasikan anggaran untuk pelayanan informasi publik pada pos anggaran operasional Divisi Corporate Secretary, konsisten sebesar Rp500.000,000 dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp154.500.000. Anggaran tersebut digunakan untuk pelaksanaan focus group discussion pengisian kuisioner Monev KIP tahun 2023 serta pengembangan *website* dan aplikasi *mobile* PPID BTN (Tahap 1).



RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Waktu Pelayanan

Sebagaimana tertuang di dalam Ketentuan Internal Perseroan terkait mekanisme permohonan informasi publik, maka Petugas Layanan Informasi Publik menyampaikan jawaban permohonan kepada pemohon paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan.

Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik Tahun 2023

Pemohon	Jumlah	Waktu Pemberian Informasi	Informasi		
			Ditolak	Diberikan Sebagian	Diberikan
Individu	3	10 hari Kerja	1	-	2
Badan Hukum	0		-	-	-
Kelompok Orang	0		-	-	-

Selama tahun 2023, tidak ada pengajuan atau penyelesaian sengketa Informasi Publik

Sistem Pengelolaan Administrasi Informasi Publik

Tugas dan fungsi PPID yakni mulai dari identifikasi informasi yang dihasilkan, penyimpanan, pendokumentasian hingga penyediaan dan pelayanan informasi publik. Dalam rangka pengelolaan administrasi informasi publik, pencatatan informasi dituangkan dalam Daftar Informasi Publik yang terdiri dari registrasi permohonan, pemberitahuan, penolakan dan keberatan atas informasi publik dan tersedia dalam bentuk:

1. *Hard copy* atau *soft copy*;
2. Bersifat berkala, setiap saat dan/atau serta merta; dan
3. Jangka waktu penyimpanan informasi publik mengacu ketentuan pengelolaan asrip Perseroan.

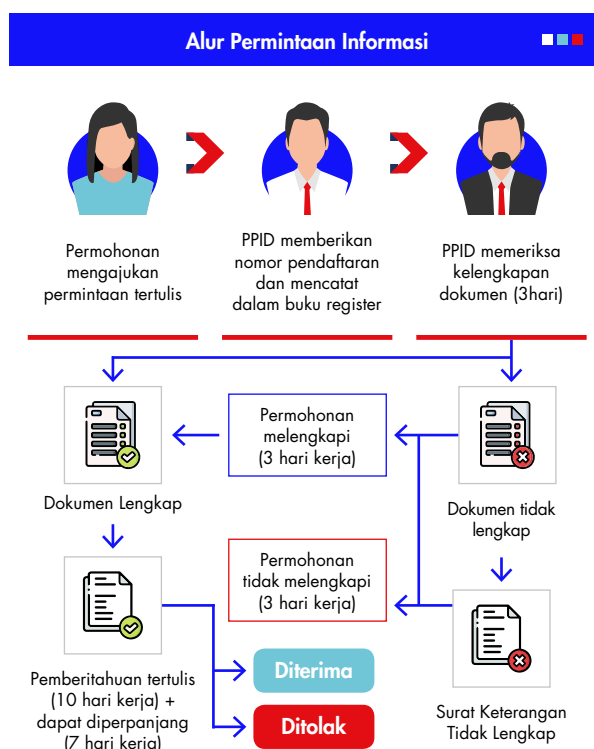
Prosedur Permohonan Informasi Publik

Permohonan Informasi oleh masyarakat dapat melalui akses terbuka untuk umum yang disediakan oleh Perseroan.

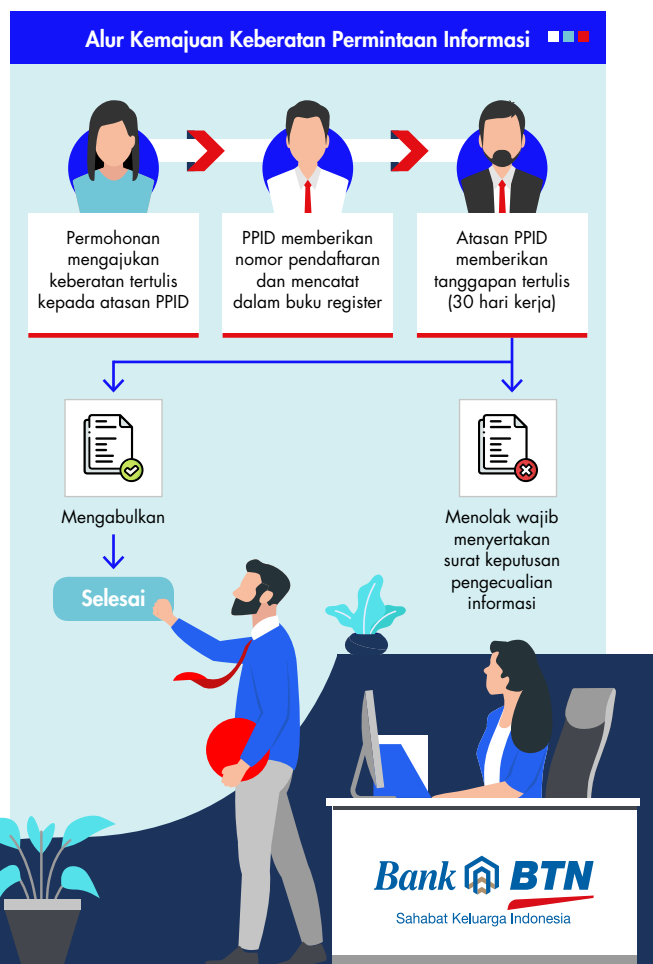
1. Masyarakat dapat langsung datang ke Kantor PPID Pusat di Kantor Pusat – Menara BTN Lantai 20 Jalan Gajah Mada Nomor 1 Jakarta Pusat atau ke Kantor Cabang terdekat di daerah pengguna informasi.
2. Informasi juga dapat diminta melalui surat yang dikirimkan ke Kantor PPID Pusat dan/atau Kantor Cabang terdekat.
3. Jika melalui *email*, maka dapat dikirimkan ke csd@btn.co.id.
4. Bilamana merasa lebih mudah untuk berkomunikasi melalui telepon, maka dapat menghubungi PPID Pusat ke nomor 021-6336789 Ext. 2003.
5. Pesan permintaan informasi juga dapat disampaikan melalui aplikasi WhatsApp ke nomor 0877-7150-0286.

6. Kanal informasi lainnya yang saat ini sangat mudah diakses juga diawasi tindak lanjutnya yaitu website <https://ppid.btn.co.id>.
7. Melalui aplikasi android BTN PPID yang dapat diunduh melalui *smartphone* pengguna informasi.

Prosedur Permohonan Informasi Publik



Prosedur Pengajuan Keberatan Permintaan Informasi Publik



KENDALA PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Terdapat beberapa kendala dalam rangka pelaksanaan Layanan Informasi Publik selama Tahun 2023. Kendala tersebut muncul dari pihak Internal maupun Eksternal Perseroan. Seiring dengan perkembangan keterbukaan informasi publik saat ini, kendala yang terjadi turut melibatkan kenyamanan pemohon mendapatkan informasi publik secara tatap muka ke Kantor Cabang layanan. Pemohon yang datang langsung ke kantor cabang akan bertemu dengan Petugas Layanan Informasi Publik di area kerja Customer Service, namun tidak semua Kantor Cabang Perseroan memiliki *layout* dengan format *digital banking hall* sehingga tidak terjadi kesamaan kenyamanan oleh pemohon yang datang langsung.

Kemudian, dari sisi eksternal, masih terjadi di antara pemohon informasi yang melakukan permintaan informasi yang sudah Perseroan sampaikan baik secara langsung antar muka maupun lewat media sosial serta elektronik lainnya seperti media *website* dan aplikasi *mobile*. Namun, hal ini menjadi kewajiban petugas layanan untuk tetap kembali menginformasikan sehingga dari pihak pemohon dapat terliterasi dengan baik.

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK LAYANAN INFORMASI PUBLIK BANK BTN DI TAHUN 2024

Dari pelaksanaan layanan informasi publik di Tahun 2023, Perseroan memiliki beberapa rekomendasi dan rencana tindak lanjut yang dapat meningkatkan serta menunjang kinerja layanan informasi publik di tahun 2024, antara lain:

1. Perseroan berencana melaksanakan transformasi terhadap struktur organisasi PPID BTN agar semakin *agile* dan efisien baik dari sisi kinerja layanan, pengawasan dan pencapaian target yang optimal.
2. Implementasi sarana dan prasarana layanan informasi publik terutama untuk penyandang disabilitas.
3. Melakukan upaya yang optimal dalam memberikan pengalaman layanan yang setara di seluruh Kantor Cabang dengan menyediakan ruangan untuk layanan informasi publik yang nyaman dan terintegrasi dengan layanan *digital*.
4. Melaksanakan pengembangan *website* dan aplikasi *mobile* serta sosialisasi kepada masyarakat atas layanan informasi *digital* Perseroan.
5. Mengedepankan sosialisasi dan/atau pelatihan terkait Keterbukaan Informasi Publik kepada petugas layanan informasi publik di Kantor Cabang di seluruh Indonesia.



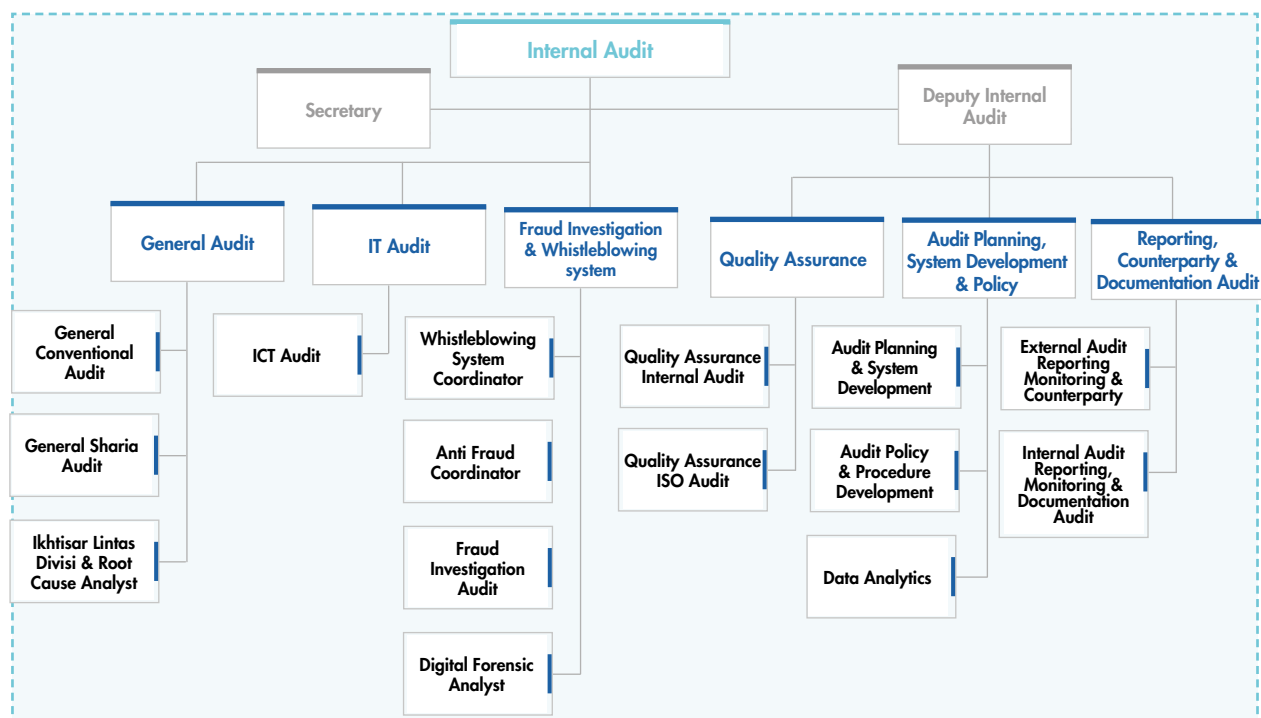
Fungsi Audit Internal

Fungsi audit internal merupakan *strategic business partner* bagi manajemen dalam mengoptimalkan implementasi GCG Perseroan, manajemen (pengelolaan) risiko dan memberikan *assurance* serta masukan secara independen dan objektif terkait pengendalian internal Perseroan. Fungsi audit internal dijalankan oleh Internal Audit Division (IAD) melalui proses evaluasi berdasarkan *risk based audit* secara objektif dan jasa konsultasi terutama yang menyangkut peningkatan dan penyempurnaan *risk management, control* dan *governance processes*. Fungsi tersebut dilakukan melalui pendekatan yang proaktif, antusias dan dinamis, berkomunikasi secara efektif, berorientasi pada bisnis dan *stakeholders*, pemahaman terhadap pokok permasalahan (*root of the problem*) dan area yang memiliki risiko tinggi, penekanan temuan pada kualitas, serta merekomendasikan penyelesaian yang praktis dan *workable*.

Kedudukan Fungsi Audit Intern Dalam Struktur Organisasi

Kedudukan Internal Audit Division (IAD) sebagai pelaksana fungsi audit internal berada di bawah supervisi Direktur Utama sebagaimana telah ditetapkan berdasarkan Petunjuk Teknis No.PT.3-A.6 tanggal 14 September 2023 tentang Struktur Organisasi Kantor Pusat, Kantor Wilayah, dan Kantor Cabang. Selain itu, kedudukan fungsi audit internal juga dijelaskan dalam Piagam Audit Intern yang diatur dalam Kebijakan Khusus No.KK.7-A tanggal 27 April 2023 sebagaimana diubah terakhir pada tanggal 31 Oktober 2023, pada Bab II Struktur dan Kedudukan IAD yaitu:

Struktur Organisasi Internal Audit Division



1. Butir 1 disebutkan bahwa Internal Audit Division (IAD) merupakan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) dalam organisasi Bank yang kedudukannya langsung di bawah Direktur Utama.
2. Butir 2 disebutkan bahwa IAD sebagaimana dimaksud dalam butir 1 dipimpin oleh seorang Kepala Divisi yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
3. Butir 3 disebutkan bahwa Kepala IAD sebagaimana dimaksud dalam butir 2 diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Pihak yang Mengangkat dan Memberhentikan Kepala Internal Audit Division

Pihak yang terlibat dalam proses pengangkatan atau pemberhentian Kepala Internal Audit Division adalah Direktur Utama, Dewan Komisaris, dan Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator. Secara garis besar, proses pengangkatan atau pemberhentian yang menggambarkan keterlibatan beberapa pihak dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Direksi melakukan *fit and proper test* kepada calon Kepala Internal Audit Division.
2. Direktur Utama menyampaikan permohonan persetujuan pengangkatan/pemberhentian Kepala Internal Audit Division kepada Dewan Komisaris.
3. Dewan Komisaris menyetujui atau tidak menyetujui pengangkatan/pemberhentian Kepala Internal Audit Division.
4. Dewan Komisaris dan Direktur Utama menyampaikan laporan pengangkatan/pemberhentian kepala Internal Audit Division kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator.

Profil Kepala Audit Internal



HENDRATNO TRI WIBOWO

Internal Audit Division Head

Warga Negara Indonesia, berusia 49 tahun,
berdomisili di Kota Tangerang Selatan



Riwayat Pendidikan

- Diploma (D3) Akuntansi dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (1995)
- Sarjana (S1) Akuntansi dari Universitas Indonesia (1998)
- Magister (S2) Akuntansi dari The University of Queensland, Australia (2003)



Pengalaman Kerja

- Auditor/Investigator Badan Pemeriksa Keuangan RI (1995-2010)
- Fraud Risk Management Division Head, Bank Permata Tbk (2011-2020)
- Post Mortem & Forensic Audit (Special Audit) Division Head, Bank Exim Indonesia (2020-2021)
- Internal Audit Division Head, Bank BTN (2021- sekarang)



Sertifikasi

- *Certified Internal Audit Executive* (CIAE)
- Kompetensi Manajemen Risiko Level 4 – Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan



Dasar Hukum Pengangkatan

- Surat Keputusan Direksi No.642/DIR/2021 tanggal 26 Juli 2021 tentang Kepala Satuan Kerja Audit Internal PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
- Surat Dewan Komisaris PT Bank Tabungan Negara No.60/KOM/BTN/V/2021 tanggal 05 Mei 2021 perihal Persetujuan Usulan Pengangkatan Kepala Internal Audit Division/Kepala Satuan Kerja Audit Internal (SKAI).



Pelatihan yang diikuti Pada Tahun 2023

- Internal Workshop Pembekalan Audit 2023.
- Konferensi Auditor Internal (KAI)
- GRC Masterclass "ESG for Auditor"
- Qualified Internal Auditor (QIA) & Standar

Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*)

Internal Audit Division telah dilengkapi Pedoman Kerja yang disebut dengan *Internal Audit Charter* (Piagam Audit) yang telah disusun sejak tahun 2002 kemudian dimutakhirkan dan ditetapkan terakhir berdasarkan Kebijakan Khusus No.KK.7-A tanggal 27 April 2023 sebagaimana diubah terakhir pada tanggal 31 Oktober 2023 tentang Piagam Audit Intern. *Internal Audit Charter* juga menjadi dasar keberadaan, pelaksanaan tugas-tugas dan tanggung jawab pengawasan bagi IAD. Oleh karena itu, *Internal Audit Charter* disosialisasikan kepada seluruh pegawai dan pihak terkait lainnya untuk mendorong efektivitas pelaksanaan fungsi audit internal. Isi dari *Internal Audit Charter* adalah sebagai berikut:

1. Misi Internal Audit Division;
2. Struktur dan Kedudukan Internal Audit Division;
3. Ruang Lingkup;
4. Tugas & Tanggung Jawab Serta Wewenang;
5. Independensi, Objektivitas serta Larangan Perangkapan Tugas dan Jabatan Auditor Intern;
6. Kode Etik dan Persyaratan Auditor Intern;
7. Penggunaan Jasa Pihak Ekstern dalam Pelaksanaan Audit Intern;

8. Hubungan Internal Audit Division dengan Auditor Ekstern atau Ahli Hukum;
9. Lain-lain.

Tugas dan Tanggung Jawab Internal Audit

Internal Audit Division membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris serta seluruh tingkatan manajemen dalam memastikan kecukupan sistem pengendalian intern Bank dan memberikan saran-saran yang strategis dan konstruktif terhadap pengelolaan Bank dalam kerangka penerapan tata kelola Bank yang baik dan sehat dengan tugas-tugas sebagai berikut:

1. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit;
2. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya melalui audit secara *on-site* dan pemantauan secara *off-site*, termasuk melakukan audit manajemen terhadap seluruh unit kerja Bank;
3. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana;

- Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen;
- Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal Tahunan dan alokasi anggaran untuk pelaksanaan fungsi audit intern;
- Menguji dan melakukan evaluasi atas efektivitas pelaksanaan sistem pengendalian intern, manajemen risiko, dan proses tata kelola perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Bank;
- Melakukan pemeriksaan, penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
- Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris;
- Memantau, menganalisis, dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- Bekerja sama dengan Komite Audit;
- Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya;
- Melakukan pemeriksaan (audit) khusus apabila diperlukan.

Kewenangan Internal Audit

Untuk dapat melaksanakan misi, fungsi dan tugas audit, maka IAD mempunyai wewenang paling sedikit sebagai berikut:

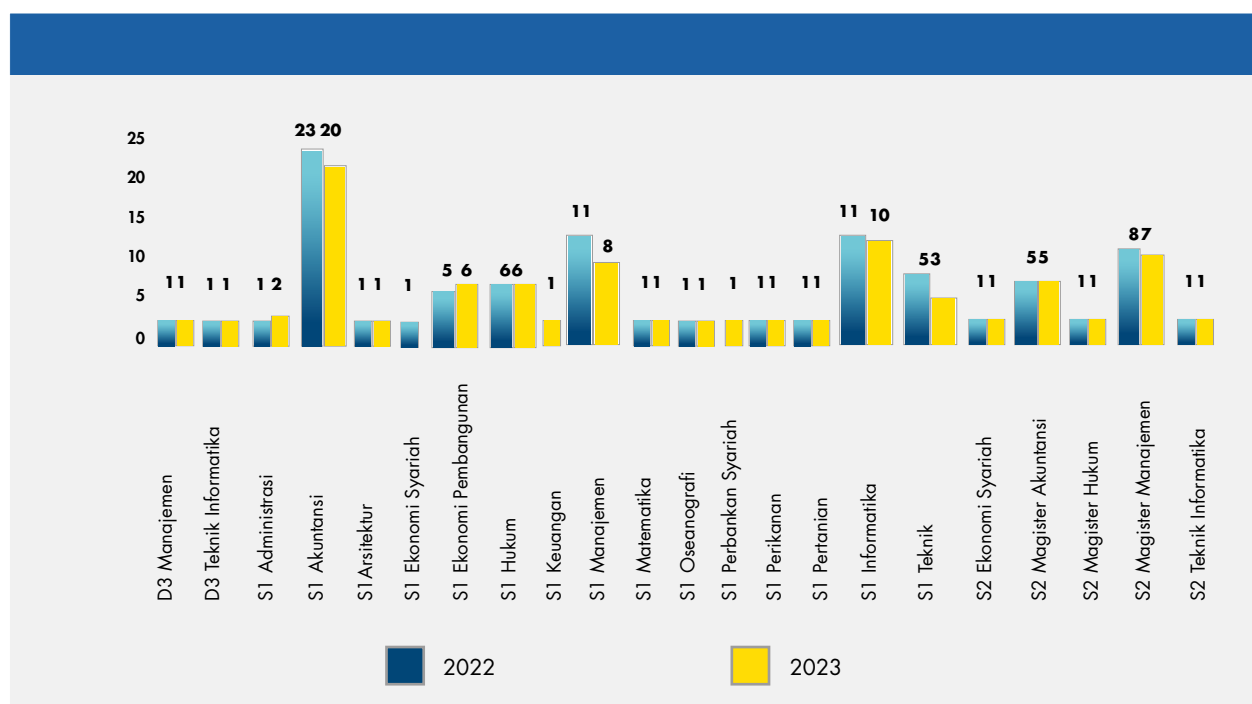
- Mengakses seluruh informasi, data dan termasuk di dalamnya namun tidak terbatas pada data pegawai dan sumber daya serta hal-hal lain yang dianggap perlu terkait dengan tugas dan fungsinya.
- Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, Komite Audit dan/atau Dewan Pengawas Syariah serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, Komite Audit dan/atau Dewan Pengawas Syariah.
- Mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris, Komite Audit dan/atau Dewan Pengawas Syariah sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya.
- Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor ekstern.
- Mengikuti rapat yang bersifat strategis.

Komposisi Personil Internal Audit Division

Perseroan sangat memperhatikan kecukupan komposisi personil Internal Audit Division dalam menunjang pelaksanaan tugasnya baik dari segi jumlah kualifikasi jabatan hingga kompetensi. Personil Internal Audit Division sampai dengan Desember 2023 berjumlah **79 (tujuh puluh sembilan)** orang yang dipimpin oleh 1 (satu) orang Kepala Divisi dan dibantu oleh 1 (satu) orang Sekretaris, 1 (satu) orang Wakil Kepala Divisi, 39 (tiga puluh sembilan) orang pada General Audit Department, 7 (tujuh) orang pada IT Audit Department, 9 (sembilan) orang pada Fraud

Investigation & Whistleblowing System Department, 8 (delapan) orang pada Quality Assurance Department, 6 (enam) orang pada Audit Planning, System Development & Policy Department, dan 7 (tujuh) orang pada Reporting, Counterparty & Documentation Audit Department.

Komposisi personil Internal Audit Division berdasarkan pendidikan sebagai berikut:



Program Peningkatan Kompetensi Internal Audit Division

Setiap personil IAD difasilitasi dan didorong untuk mengembangkan kompetensinya dalam menunjang pelaksanaan fungsi audit internal. Pengembangan kompetensi dilakukan diantaranya dengan cara *knowledge sharing* di antara Kepala IAD, Direksi, dan para auditor terhadap Kebijakan dan Prosedur Internal, program sertifikasi, pendidikan dan pelatihan, *workshop* serta seminar. Selama tahun 2023 pengembangan kompetensi yang telah dilakukan dalam bentuk pelatihan baik internal maupun eksternal antara lain sebagai berikut.

Tabel Pengembangan Kompetensi Personil Internal Audit Division

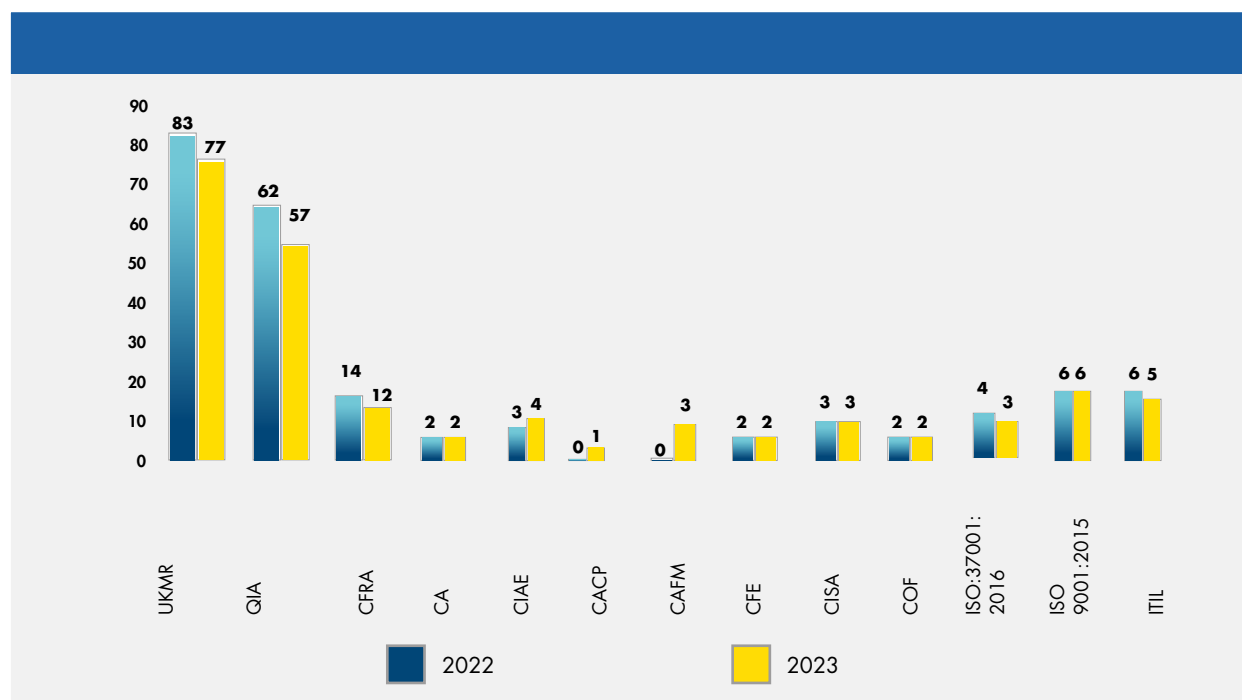
No	Nama Pendidikan/Pelatihan	Penyelenggara	Tanggal Pelaksanaan	Jumlah Peserta
Sertifikasi				
1	Pembekalan dan Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1	PT Garda Multi Talenta	15 - 16 Februari 2023	1
2.	<i>Refreshment</i> Sertifikasi Bidang Manajemen Risiko Perbankan	PT Garda Multi Talenta	13 Juli 2023 (batch 1)	3
			18 Juli 2023 (batch 2)	10
			20 Juli 2023 (batch 3)	8
			02 Agustus 2023 (batch 4)	8
			09 Agustus 2023 (batch 6)	1
			10 Agustus 2023 (batch 7)	7
			19 Agustus 2023 (batch 8)	1
3	Pelatihan Sertifikasi <i>Certified Fraud Examiner</i> (CFE)	Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)	07 - 11 Agustus 2023	1
4	Pelatihan Sertifikasi <i>Certification in Audit Committee Practices</i> (CACP)	Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI)	22 - 24 Agustus 2023, 28 Agustus 2023	1
5	Pelatihan Sertifikasi <i>Qualified Internal Auditor</i> (QIA) - Pra Manajerial	Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA)	21 - 26 Agustus 2023	2
6	Pelatihan Sertifikasi <i>Qualified Internal Auditor</i> (QIA) - Manajerial	Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA)	11 - 20 September 2023	1
			23 Oktober - 01 November 2023	1
7	Pelatihan Sertifikasi <i>Certified Anti Fraud Manager</i> (CAFM)	Asia Anti Fraud Manajemen (AAFM)	04 - 06 September 2023	3
8	Pelatihan Sertifikasi <i>Certified Internal Auditor</i> (CIA)	The Institute of Internal Auditors (IIA)	02 - 05 Oktober 2023 (part 1) 09 - 11 Oktober 2023 (part 2) 16 - 18 Oktober 2023 (part 3)	1
9	Pelatihan Sertifikasi ISO 9001:2015 <i>Lead Auditor</i>	PT BSI Group Indonesia	09 - 13 Oktober 2023	2
Pelatihan dan Workshop				
1	Pelatihan <i>Refreshment</i> Proses Bisnis Bank BTN Tahun 2023	Bank BTN	05 s.d 17 Januari 2023	39
2	Pelatihan BTN IT <i>Planning dan Management</i>	Bank BTN (Internal ITPD bersama rekanan pihak ke-3)	05 dan 12 Januari 2023	8
3	Pelatihan BTN IT <i>Network Infrastructure</i>	Bank BTN	06 Januari 2023	8
4	Pelatihan BTN IT <i>Security</i>	Bank BTN	27 s.d 31 Januari 2023	8
5	Pendidikan Klasikal 1 Program Pengembangan Talent Bank BTN Tahun 2023	Bank BTN & LPPI	16 s.d 20 Januari 2023 (Batch 1) 20 s.d 24 Januari 2023 (Batch 3)	4
6	Pelatihan <i>Payment Card Industry Data Security Standard</i>	PT Systech Global Informasi	09 s.d 11 Januari 2023	8
7	Pelatihan Aplikasi OPICS	PT Abhimata Persada	13 Januari 2023	8
8	Pelatihan <i>Security & Hacking Technique for Web & Mobile Apps Based Applications</i>	PT TjakraBirawa Teknologi Indonesia	18 - 25 Januari 2023	8
9	Pelatihan <i>Fundamental of Trade Finance from Audit Perspective</i>	Alta Perfecto Training & Consulting	20 s.d 21 Januari 2023	13
10	Pelatihan <i>Fundamental of Treasury Operation from Audit Perspective</i>	Alta Perfecto Training & Consulting	24 s.d 25 Januari 2023	13
11	Pelatihan <i>Human Capital Overview for Auditors</i>	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI)	26 s.d 27 Januari 2023	13
12	Pendidikan <i>Impactful Presentation Skill</i> Batch 1	PT SGS Indonesia	02 - 04 Februari 2023	2

No	Nama Pendidikan/Pelatihan	Penyelenggara	Tanggal Pelaksanaan	Jumlah Peserta
13	Webinar OJK <i>Institute "Implementasi Artificial Intelligence di Industri Jasa Keuangan"</i>	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	02 Februari 2023	1
14	Pelatihan Analisis dan Visualisasi Data Menggunakan Excel	DQ Lab Trainer	06 - 08 Februari 2023	25
15	Pelatihan PPDigital	Bank BTN	15 Februari 2023	2
16	Pelatihan Audit Investigasi	Widyaiswara Badan Pendidikan dan Pelatihan BPK RI	13 Februari 2023	15
17	Pelatihan <i>Communication Skill for Internal Auditors</i>	The Institute of Internal Auditors (IIA)	15 - 16 Februari 2023	32
18	Pelatihan <i>Communication Skill for Senior Auditors</i>	The Institute of Internal Auditors (IIA)	15 s.d 16 Februari 2023	26
19	Workshop Pembekalan Audit 2023	IAD & Deloitte	17 Februari 2023	27
20	Pelatihan Identifikasi Titik Kritis Kecurangan (<i>Fraud</i>) Pengadaan Barang/Jasa dan <i>Supply Chain Financing</i>	Lembaga Pengembangan Fraud Auditing	20 s.d 21 Februari 2023	13
21	Pendidikan <i>Impactful Presentation Skill Batch 2</i>	PT SGS Indonesia	23 - 25 Februari 2023	1
22	<i>Expert Talk Session - "The Future of Competitive Strategy for Great Business Transformation"</i> Bank BTN	Bapak Ignasius Jonan	04 Maret 2023	8
23	Webinar OJK <i>Institute "Pemanfaatan Analisis Big Data dalam Meningkatkan Kinerja Industri Jasa Keuangan"</i>	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	30 Maret 2023	2
24	<i>Training</i> Pelaporan <i>Single Customer View (SCV)</i>	Banking and Finance Development Center	12 s.d 13 April 2023	1
25	Webinar I APU dan PPT Tahun 2023	Rafi Wisesa	12 April 2023	2
26	Pendidikan Klasikal 2 Program Pengembangan <i>Talent Bank BTN Tahun 2023</i>	Bank BTN	10 s.d 14 April 2023 (Batch 1) 08 - 12 Mei 2023 (Batch 2) '22 - 26 Mei 2023 (Batch 3)	4
27	<i>Leadership Forum "Envisioning Culture For Leader"</i>	PwC dan McKinsey	11 - 14 Mei 2023	2
28	Webinar <i>"How to Manage Climate Related Risk in Banking Industry"</i>	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	15 Juni 2023	1
29	Webinar <i>"Awareness Penerapan Program APU dan PPT Menjelang Pemilu/Pilkada"</i>	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)	21 Juni 2023	2
30	Pelatihan <i>Digital Marketing Strategy</i>	Patrick Rimba	04 Juli 2023	1
31	Konferensi Auditor Internal (KAI) 2023	Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA)	05 - 06 Juli 2023	3
32	<i>Workshop The Indonesian Institute For Corporate Governance (IICG)</i>	The Indonesian Institute For Corporate Governance (IICG)	12 - 13 Juli 2023	1
33	Pelatihan Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan dan Penentuan Tindak Pidana Asal	Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan	17 - 18 Juli 2023 (Batch 4)	1
34	Pelatihan <i>Oxygen Forensic Extraction in a Box</i>	Bounga Solusi Informatika	26 - 28 Juli 2023	2
35	Konferensi Nasional IAIB Tahun 2023	Ikatan Audit Intern Bank (IAIB)	12 - 13 Juli 2023	3
36	Pelatihan <i>Intro to Phyton for Data Science</i>	PT Hacktivate Teknologi Indonesia	24 Juli - 18 September 2023	2
37	Pelatihan Penggunaan eProcurement, Kebijakan Pengadaan Barang dan/atau Jasa dan Kearsipan	Bank BTN	22 Agustus 2023	1
38	Pelatihan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)	14 - 18 Agustus 2023 22 - 24 Agustus 2023	2
39	IIA Indonesia <i>National Conference</i>	The Institute of Internal Auditors (IIA)	30 Agustus - 01 September 2023	3
40	Webinar OJK <i>"Leadership in Changing Atmosphere"</i>	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	24 Agustus 2023	1
41	Webinar <i>"Efektivitas Digital Maturity Assessment dalam Mengukur Kematangan Transformasi Digital Perbankan"</i>	Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP)	28 Agustus 2023	1

No	Nama Pendidikan/Pelatihan	Penyelenggara	Tanggal Pelaksanaan	Jumlah Peserta
42	Pelatihan GRC <i>Masterclass Program</i>	BUMN Leadership & Management Institute (BLMI)	07 September 2023	1
43	Workshop Standar dan Kode Etik Profesi Auditor Internal	Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA)	11 - 12 September 2023	1
44	Pelatihan Aplikasi <i>Whistleblowing System</i> TPK Terintegrasi	Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)	12 September 2023	2
45	National <i>Anti Fraud Conference</i> 2023	Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)	13 - 14 September 2023	4
46	Pelatihan Audit Dana Pensiun	Bank BTN & LPPI	22 - 23 September 2023	12
47	<i>E-Learning</i> Peningkatan Pemahaman Gratifikasi KPK Tahun 2023	Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)	12 - 14 Oktober 2023	1
48	Konferensi Nasional Komite Audit	Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI)	19 Oktober 2023	1
49	Pelatihan Penanganan Aset Virtual dalam Proses Penegakan Hukum	Bank BTN	02 - 03 November 2023	2
50	<i>Refreshment</i> Materi LHPK Sistem Pembayaran dan <i>Financial Market Instructure</i> BI serta KPHDN Tahun 2023	Bank Indonesia	03 November 2023	1
51	<i>Training</i> Aplikasi <i>Integrated End to End Procurement</i>	Bank BTN	06 - 15 November 2023	1
52	Pelatihan Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan dan Penentuan Tindak Pidana Asal	Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan	15 - 16 November 2023 (Batch 6)	2
53	Forum <i>Human Capital</i> Indonesia " <i>Elevating Cybersecurity Awareness for SOEs: Empowering Digital Talents Readiness</i> "	Forum Human Capital Indonesia (FHCI)	21 November 2023	2
54	Seminar Nasional Internal Audit (SNIA)	Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA)	6 - 7 Desember 2023	2

Sertifikasi Profesi Personil Internal Audit Division

Secara keseluruhan jumlah sertifikasi personil Internal Audit Division posisi Desember 2023 sebagai berikut:



Keterangan:

UKMR (Uji Kompetensi Manajemen Risiko), QIA (Qualified Internal Auditor), CFRA (Certified Forensic Auditor), CA (Chartered Accountant), CIAE (Certified Internal Audit Executive), CACP (Certification in Audit Committee Practices), CAFM (Certified Anti Fraud Manager), CFE (Certified Fraud Examiner), CISA (Certified Information System Auditor), COF (Certified Oxygen Forensic), ISO 37001:2016 (Sistem Manajemen Anti Penyuapan), ISO 9001:2015 (Sistem Manajemen Mutu), ITIL Foundation Certificate in IT Service Management.



Partisipasi Dalam Penghimpunan Profesi Audit Internal

Dalam rangka memperluas wawasan dan pengembangan profesional Auditor Intern, Organisasi Internal Audit Perseroan telah berpartisipasi dengan mengikutsertakan para auditornya pada berbagai organisasi profesi internal audit, di antaranya sebagai anggota maupun keikutsertaan dalam kegiatan perhimpunan profesi audit intern sebagai berikut:

1. Organisasi Ikatan Auditor Intern Bank Indonesia (IAIB)

Dalam rangka pengembangan dan peningkatan wawasan, maka para Pimpinan dan Auditor IAD selalu ikut serta dalam forum-forum pertemuan diskusi *benchmarking* dan *workshop* perkembangan *best practice* yang diselenggarakan oleh forum IAIB. Materi *workshop* dan *benchmarking* dalam forum IAIB ini meliputi materi level manajerial pengelolaan fungsi Audit Internal bagi para pimpinan *Chief Auditor Executive* (CAE) maupun untuk level Auditor berupa Teknik audit, metodologi audit dan Audit ICT yang diselenggarakan melalui forum diskusi maupun *workshop* dengan Auditor Bank-bank lain yang tergabung dalam IAIB.

2. The Institute of Internal Auditor (IIA) dan Association Certified Fraud Examiner (ACFE) – Indonesia Chapter

Selanjutnya anggota internal audit juga didorong untuk menjadi *membership* of The Institute of Internal Auditor (IIA) dan Association Certified Fraud Examiner (ACFE)-Indonesia Chapter.

Kode Etik Auditor

Kode Etik Audit Intern adalah norma dan asas mengenai keputusan dan kepantasan yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh auditor intern, yang paling sedikit mencakup kode etik pelaksanaan audit intern sebagaimana ditetapkan oleh asosiasi profesi audit intern sebagai berikut:

1. Integritas

- Harus melaksanakan pekerjaannya secara jujur, hati-hati, bertanggung jawab, dan teliti
- Harus mematuhi aturan hukum dan mengungkapkan segala hal yang diharapkan oleh ketentuan hukum maupun profesi
- Tidak terlibat dalam kegiatan ilegal atau melakukan kegiatan yang dapat mendiskreditkan profesi audit intern atau organisasi.
- Harus menghormati dan mendukung tujuan organisasi yang sah dan etis.

2. Objektivitas

- Tidak boleh berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan apapun yang dapat, atau patut diduga dapat, menghalangi penilaian Auditor Intern yang adil. Termasuk dalam hal ini adalah kegiatan atau hubungan apapun yang mengakibatkan timbulnya pertentangan kepentingan dengan organisasi.

- Tidak boleh menerima apapun yang dapat, atau patut diduga dapat mengganggu pertimbangan profesionalnya.

- Harus mengungkapkan semua fakta material yang diketahuinya, yang jika tidak diungkapkan dapat mendistorsi laporan atas kegiatan yang sedang di-review.

3. Kerahasiaan

- Harus berhati-hati dalam menggunakan dan menjaga informasi yang diperoleh selama melaksanakan tugasnya.
- Tidak boleh menggunakan informasi untuk memperoleh keuntungan pribadi, atau dalam cara apapun yang bertentangan dengan hukum atau merugikan tujuan organisasi yang sah dan etis.

4. Kompetensi

- Hanya terlibat dalam pelaksanaan audit yang memerlukan pengetahuan, kecakapan dan pengalaman yang dimilikinya.
- Melaksanakan audit sesuai dengan Standar Profesional Audit Intern.
- Harus senantiasa meningkatkan keahlian, keefektifan dan kualitasnya secara berkelanjutan.

Laporan Singkat Pelaksanaan Kegiatan Internal Audit Tahun 2023

Pada tahun 2023, *Internal Audit Division* (IAD) telah menyusun rencana atau program kerja audit dan melaksanakan kegiatan audit sesuai dengan rencana yang telah disusun. Rencana program kerja tersebut meliputi sifat dan ruang lingkup audit, penilaian risiko (*risk assessment*), susunan dan jumlah personil tim audit, standar hari kerja efektif audit, lamanya waktu standar hari audit, kebutuhan jumlah personil dan kualifikasi jabatan personil IAD, serta pengembangan personil IAD.

RENCANA KERJA AUDIT INTERNAL

Rencana Kerja Internal Audit Division dijabarkan dalam buku *Annual Audit Plan* dengan periode kerja selama 1 tahun. Rencana Kerja Audit Tahunan untuk Internal Audit Division (IAD) tahun 2023 telah disampaikan kepada Direktur Utama berdasarkan memo IAD No.252/M/IAD/APSP/XII/2022 tanggal 22 Desember 2022 perihal Usulan Rencana Audit Tahunan (*Annual Audit Plan*) Tahun 2023 serta telah disetujui dan ditandatangani oleh Direktur Utama. Di samping itu sesuai regulasi POJK Nomor 1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum, Rencana Kerja Audit Tahunan (*Annual Audit Plan*) juga telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris berdasarkan surat Dewan Komisaris No.25/KOM/BTN/II/2023 tanggal 8 Februari 2023. Rencana kerja audit tahun 2023 secara umum adalah sebagai berikut:

Tabel Program Kerja Audit Internal

Objek Audit	Jumlah		Perubahan		Keterangan
	2023	2022	+/-	%	
A. Audit Umum (General Audit)	69	91	-22	-24,18	
B. Audit ICT	18	16	2	12,50	
C. Audit Khusus	0	0	0	0,00	Tidak terdapat perencanaan terjadwal untuk pelaksanaan audit khusus/investigasi untuk tahun 2023, akan mengikuti penugasan dari <i>stakeholders</i> dan <i>whistleblowing system</i> .
D. Audit Mutu Internal (AMI) Sertifikasi ISO	27	23	4	17,39	
Jumlah Objek Audit	114	130			

PELAKSANAAN PROGRAM KERJA INTERNAL AUDIT DIVISION

Selama periode Januari sampai dengan Desember 2023 Internal Audit Division telah melaksanakan kegiatan audit dengan objek audit yang mencakup:

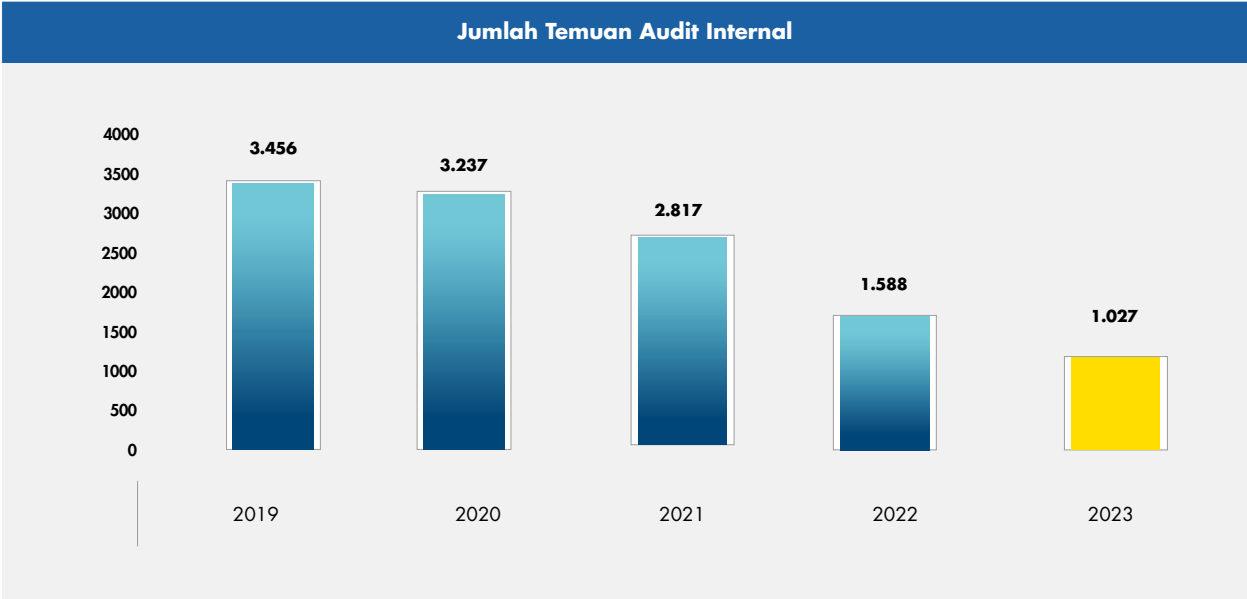
- Audit Umum (*General Audit*) yang terdiri atas:
 - Audit Operasional terhadap jaringan kantor (KC, KC Syariah dan Regional Office).
 - Audit Tematik yang dilakukan berdasarkan tema tertentu antara lain Pengelolaan Kredit, Penghimpunan DPK, Human Capital, Pengadaan Barang dan/atau Jasa, dan *Treasury*.
 - Audit Mandatory berdasarkan ketentuan yang diterbitkan *regulator*.
- Audit *Information and Communication Technology* (ICT) yang terdiri atas:
 - Audit Tematik yang dilakukan berdasarkan tema tertentu pada lingkup pengelolaan ICT antara lain meliputi *Mobile Banking*, Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), Aplikasi Pendukung *Treasury*, serta audit terhadap Keamanan Siber dengan fokus pada *assessment* terhadap kesiapan Bank dalam melakukan deteksi dan respon terhadap insiden siber berdasarkan NIST *Cybersecurity Framework*.
 - Audit Mandatory berdasarkan ketentuan yang diterbitkan *regulator*.
- Audit Khusus terhadap dugaan kecurangan atau tujuan tertentu.
- Audit Mutu Internal (AMI) Sertifikasi ISO terhadap unit kerja yang telah tersertifikasi ISO 9001:2015 (Standar Manajemen Mutu), ISO 37001:2016 (Sistem Manajemen Anti Penyuapan), ISO 37301:2021 (Sistem Manajemen Kepatuhan).

Berikut adalah rincian pelaksanaan audit selama periode Januari sampai dengan Desember 2023:

Tabel Realisasi Program Kerja Audit Internal

No	Keterangan	Target	Realisasi	% Pencapaian
1	Audit Umum (<i>General Audit</i>)	69	71	102,90%
2	Audit ICT (<i>Information & Communication Technology Audit</i>)	18	19	105,56%
3	Audit Khusus	0	14	100,00%
4	Audit Mutu Internal (AMI) Sertifikasi ISO	27	38	140,74%
TOTAL		114	142	124,56%

Kegiatan audit selama periode Januari sampai dengan Desember 2023 menghasilkan temuan audit sebanyak 1.027 temuan sebagaimana disajikan pada grafik temuan audit selama 5 (lima) tahun terakhir berikut:



MONITORING TINDAK LANJUT HASIL AUDIT

Tindak lanjut atas temuan audit dilaksanakan oleh auditee. Hasil pelaksanaan tindak lanjut dilaporkan kepada Kepala IAD dan kemudian dievaluasi untuk melihat apakah tindak lanjut tersebut sudah sesuai dengan yang dimaksud. Untuk tindak lanjut yang sudah tuntas akan dinyatakan “selesai ditindaklanjuti” dan diinformasikan kepada *auditee* dan Direksi. Adapun bagi tindak lanjut yang belum selesai dan masih berstatus “*pending item*” diminta untuk diselesaikan oleh auditee dengan penjelasan yang diperlukan dan akan dilaporkan oleh Kepala IAD kepada Direksi. Sepanjang tahun 2023, telah dilakukan tindak lanjut temuan audit baik dari hasil audit tahun 2021, 2022, dan 2023 dengan resume tindak lanjut audit disajikan pada tabel berikut:

Tabel Tindak Lanjut Hasil Audit Sesuai Tanggal Jatuh Tempo Penyelesaian

No	Hasil Audit	Jumlah Komitmen	Selesai		Belum Selesai		% Penyelesaian Komitmen Jatuh Tempo
			Jumlah	%	Belum Jatuh Tempo	Telah Jatuh Tempo	
1	2	3	4	5=4/3	6	7	8=4/(4+7)
I	Internal Audit Division						
I.1	Tahun 2023						
	General Audit KC	558	550	98,57%	7	1	99,82%
	General Audit KC Syariah	169	110	65,09%	59	0	100,00%
	General Audit Divisi dan Kantor Wilayah	162	84	51,85%	78	0	100,00%
	Audit ICT	138	82	59,42%	49	7	92,13%
	Sub Total	1027	826	80,43%	193	8	99,04%
I.2	Tahun 2022						
	General Audit KC	908	908	100,00%	0	0	100,00%
	General Audit KC Syariah	217	217	100,00%	0	0	100,00%
	General Audit Divisi dan Kantor Wilayah	337	337	100,00%	0	0	100,00%
	Audit ICT	134	130	97,01%	0	4	97,01%
	Sub Total	1596	1592	99,75%	0	4	99,75%
I.3	Tahun 2021						
	General Audit KC	1674	1674	100,00%	0	0	100,00%
	General Audit KC Syariah	452	452	100,00%	0	0	100,00%

No	Hasil Audit	Jumlah Komitmen	Selesai		Belum Selesai		% Penyelesaian Komitmen Jatuh Tempo
			Jumlah	%	Belum Jatuh Tempo	Telah Jatuh Tempo	
	General Audit Divisi dan Kantor Wilayah	266	266	100,00%	0	0	100,00%
	Audit ICT	425	425	100,00%	0	0	100,00%
	Sub Total	2817	2817	100,00%	0	0	100,00%
	Total Komitmen Internal	5440	5235	96,23%	193	12	99,77%
II Komitmen Eksternal							
II.1 Otoritas Jasa Keuangan							
	KHP IT Pemeriksaan OJK Tahun 2021	148	148	100,00%	0	0	100,00%
	KHP Umum Pemeriksaan OJK Tahun 2021	147	147	100,00%	0	0	100,00%
	KHP Umum Pemeriksaan OJK Tahun 2022	203	203	100,00%	0	0	100,00%
	Total Komitmen OJK	498	498	100,00%	0	0	100,00%
II.2 Bank Indonesia							
	KHP IT & Non IT Pemeriksaan BI Tahun 2021	40	40	100,00%	0	0	100,00%
	KHP Tematik LBUT Tahun 2022	52	52	100,00%	0	0	100,00%
	Total Komitmen BI	92	92	100,00%	0	0	100,00%
II.3 Badan Pemeriksa Keuangan RI							
	Pengelolaan SBK dan SBUM Tahun Buku 2020	20	20	100,00%	0	0	100,00%
	Pengelolaan SBK dan SBUM Tahun Buku 2021	52	42	80,77%	0	10	80,77%
	Total Komitmen BPK RI	72	62	86,11%	0	10	86,11%
II.4 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI							
	Penempatan Dana PEN 2022	3	3	100,00%	0	0	100,00%
	Reviu Bansos PKH, Program Sembako dan BLT Tahun 2022	3	3	100,00%	0	0	100,00%
	Reviu P3DN Dalam Rangka BBI Tahun 2022	16	16	100,00%	0	0	100,00%
	Total Komitmen BPKP RI	22	22	100,00%	0	0	100,00%
II.5 Kantor Akuntan Publik							
	Management Letter atas Lapkeu posisi 31 Desember 2021	46	46	100,00%	0	0	100,00%
	Management Letter atas Lapkeu Interim 30 Juni 2022	26	26	100,00%	0	0	100,00%
	Management Letter atas Lapkeu posisi 31 Desember 2022	35	35	100,00%	0	0	100,00%
	Total Komitmen KAP	107	107	100,00%	0	0	100,00%
II.6 PWC							
	Jasa Kaji Ulang Fungsi Audit Internal Tahun 2023	17	13	76,47%	4	0	100,00%
	Total Komitmen PWC	17	13	76,47%	4	0	100,00%
	Total Komitmen Eksternal	808	794	98,27%	4	10	98,76%
	Total Komitmen Audit Internal dan Eksternal	6248	6029	96,49%	197	22	99,64%

PELAKSANAAN RAPAT INTERNAL AUDIT DIVISION DENGAN DIREKSI DAN KOMITE AUDIT

Mengacu pada *Internal Audit Charter* (Piagam Audit Intern), Internal Audit Division secara rutin melakukan rapat dengan Direksi serta menghadiri undangan rapat dengan Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit dalam rangka pelaporan atas pelaksanaan tugas Internal Audit Division. Sepanjang tahun 2023, Internal Audit Division telah melakukan rapat dengan Direksi, Dewan komisaris, dan Komite Audit sebagai berikut:

Pelaksanaan Rapat Internal Audit Division dengan Direksi

No	Tanggal	Agenda Rapat
1	26-27 Januari 2023	<i>Director Session</i> dan Raker Bank BTN Tahun 2023
2	12 Mei 2023	Leadership Forum 2023 "Envisioning Culture for Leader"
3	17 Maret 2023	<i>Town Hall Meeting</i> - Pengarahan Direksi
4	20 Maret 2023	Rapat Pembahasan Penanganan Pengaduan Nasabah
5	03 Mei 2023	<i>Town Hall Meeting</i> - Pengarahan Pencapaian Target Kinerja Perseroan Tahun 2023
6	05 Juni 2023	<i>Town Hall Meeting</i> - Pengarahan Pencapaian Target Kinerja Perseroan Tahun 2023
7	27 Juni 2023	Rapat Komite Manajemen Risiko (Komar)
8	14 Agustus 2023	Rapat Pembahasan Kasus/Permasalahan
9	14 Agustus 2023	Rapat Pembahasan Penyelesaian Pengaduan Nasabah
10	21 Agustus 2023	Rapat Pembahasan Kasus/Permasalahan
11	11 September 2023	Rapat Pelaporan Pelaksanaan Audit Semester 1 Tahun 2023
12	27 Oktober 2023	<i>Kick Off Pilot Initial State Strategic Business Unit</i>
13	31 Oktober 2023	Rapat Pembahasan Hasil Audit IAD Tahun 2023
14	01 November 2023	Rapat Pembahasan Hasil Audit IAD Tahun 2023
15	10 November 2023	Rapat Pembahasan Hasil Audit IAD Tahun 2023
16	14 November 2023	Rapat Pembahasan Hasil Audit IAD Tahun 2023
17	06 Desember 2023	<i>Town Hall Meeting</i>
18	12 Desember 2023	Rapat Pembahasan <i>Performance Review</i>
19	14 Desember 2023	Rapat Pembahasan Hasil Audit IAD Tahun 2023
20	18 Desember 2023	Rapat Pembahasan Agenda Rakernas

Pelaksanaan Rapat Internal Audit Division dengan Komite Audit

No	Tanggal	Agenda Rapat
1	27 Februari 2023	Rapat Pembahasan Pokok-Pokok Audit dan Tindak Lanjut Audit
2	20 Maret 2023	Rapat Pembahasan Evaluasi atas Kinerja Jasa Penunjang
3	08 Mei 2023	Rapat Pembahasan Realisasi Audit, Tindak Lanjut Audit, dan Kegiatan IAD
4	05 Juni 2023	Rapat Pembahasan Proses Putusan Sanksi Disiplin Pegawai
5	17 Juli 2023	Rapat Pembahasan <i>Root Cause</i> dan Tindak Lanjut Audit
6	07 Agustus 2023	Rapat Pembahasan Hasil Kaji Ulang Fungsi Internal Audit oleh Pihak Ekstern
7	11 September 2023	Rapat Pembahasan Realisasi Audit
8	09 Oktober 2023	Rapat Pembahasan Pembaruan Piagam Audit Intern
9	17 Oktober 2023	Pengarahan Komite Audit atas Peningkatan Pengendalian Internal pada Kantor Cabang
10	02 November 2023	Rapat Kerja Internal Audit Division Tahun 2023
11	13 November 2023	Rapat Pembahasan Perkembangan <i>Accrued Interest</i> dan Audit terkait <i>Accrued Interest</i>
12	13 November 2023	Rapat Pembahasan QRIS BTN
13	04 Desember 2023	Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Permasalahan
14	13 Desember 2023	Rapat Pembahasan <i>Fraud Risk Management</i> dan <i>Roadmap ESG</i>

ASSURANCE REVIEW TERHADAP AUDIT INTERNAL

Sejak Desember 2017 Internal Audit Division Bank BTN telah berhasil melakukan *upgrading* standar mutu ISO 9001:2008 menjadi ISO 9001:2015. Secara berkala telah dilakukan *surveillance audit* oleh auditor eksternal untuk menilai kepatuhan Internal Audit Division terhadap standar mutu ISO 9001: 2015.

Tabel Pelaksana Surveillance Audit untuk Sertifikasi ISO 9001:2008 dan ISO 9001:2015

No	Audit Eksternal	Tahun	Keterangan
1	PT SGS	2021	Pelaksanaan <i>surveillance audit</i> untuk sertifikasi ISO 9001:2015 oleh Audit Eksternal PT SGS
2	PT SGS	2022	Pelaksanaan <i>surveillance audit</i> untuk sertifikasi ISO 9001:2015 oleh Audit Eksternal PT SGS
3	PT SGS	2023	Pelaksanaan <i>surveillance audit</i> untuk sertifikasi ISO 9001:2015 oleh Audit Eksternal PT SGS

Adapun kaji ulang terhadap atas penerapan fungsi audit intern bank sebagaimana telah diatur dalam POJK No.01/POJK.03/2019 dalam menilai kesesuaian fungsi intern dengan regulasi, standar dan kode etik, serta efisiensi dan efektivitas telah dilakukan oleh *assessor* independen minimal 3 (tiga) tahun sekali dengan uraian sebagai berikut:

Tabel Assessor Independen Terkait Penilaian atas Pelaksanaan Audit

No	Audit Eksternal	Tahun	Keterangan
1	PT Deloitte Touche Tohmatsu	2018	Pelaksanaan proses <i>review gap analysis</i> kebijakan, prosedur dan metodologi serta pelaksanaan audit terhadap <i>best practices</i> SPFAIB setiap 3 tahun sekali oleh Auditor Eksternal
2	PT KPMG Sidharta Advisory	2020	Pelaksanaan proses <i>review gap analysis</i> kebijakan, prosedur dan metodologi serta pelaksanaan audit terhadap <i>best practices</i> SPFAIB setiap 3 tahun sekali oleh Auditor Eksternal
3	PT Pricewater house Coopers (PWC)	2023	Pelaksanaan proses <i>review gap analysis</i> kebijakan, prosedur dan metodologi serta pelaksanaan audit terhadap <i>best practices</i> Standar Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum setiap 3 tahun sekali oleh Auditor Eksternal

Satuan Kerja Manajemen Risiko

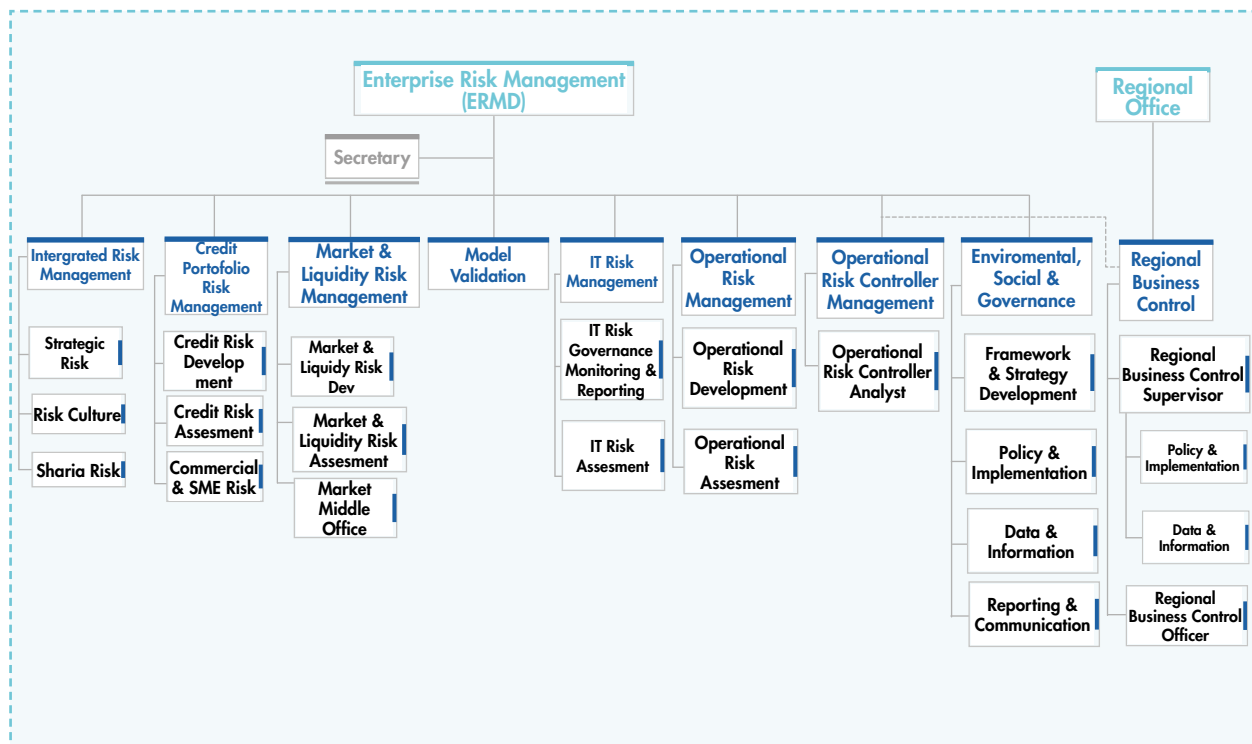
Satuan Kerja Manajemen Risiko merupakan satuan kerja yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur yang membawahi fungsi Manajemen Risiko dan bersifat independen terhadap Satuan Kerja Operasional yang merupakan *risk-taking unit*, Satuan Kerja Audit Internal dan Satuan Kerja Kepatuhan. Tata kelola risiko Perseroan yang berlandaskan prinsip GCG terwujud dari terlibatnya seluruh organ Perseroan dalam pengelolaan manajemen risiko. Hal ini dapat dilihat dari susunan organisasi manajemen risiko Perseroan.

Dewan Komisaris melalui rapat Komite Pemantau Risiko dan Direksi melalui rapat Komite Manajemen Risiko bertanggung jawab untuk memastikan penerapan Manajemen Risiko telah memadai sesuai dengan karakteristik, kompleksitas dan profil Risiko Perseroan. Dewan Komisaris dan Direksi berperan aktif pada proses manajemen risiko dalam rangka memitigasi risiko Perseroan melalui Kualitas Penerapan Manajemen Risiko meliputi tata kelola risiko, kerangka manajemen risiko, proses manajemen risiko dan kecukupan sistem informasi manajemen serta kecukupan sistem pengendalian internal.

Tata kelola risiko Perseroan yang berlandaskan prinsip *Good Corporate Governance* terwujud dari terlibatnya seluruh organ Perseroan dalam pengelolaan manajemen risiko. Hal ini dapat dilihat dari susunan organisasi manajemen risiko Perseroan. Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab untuk memastikan penerapan Manajemen Risiko telah memadai sesuai dengan karakteristik, kompleksitas dan profil risiko Perseroan. Dewan Komisaris dan Direksi berperan aktif pada proses manajemen risiko dalam rangka memitigasi risiko Perseroan melalui Kualitas Penerapan Manajemen Risiko yang meliputi tata kelola risiko, kerangka manajemen risiko, proses manajemen risiko, kecukupan sumber daya manusia, dan kecukupan sistem informasi manajemen risiko, serta kecukupan sistem pengendalian risiko.

Struktur Satuan Kerja Manajemen Risiko

Enterprise Risk Management Division (ERMD) merupakan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) pada Perseroan, dipimpin oleh seorang Kepala Divisi yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur. Struktur Organisasi Enterprise Risk Management Division terdiri dari Market Risk Management Department, Credit Risk Management Department, Operational Risk Management Department, Operations Risk Controller Management Department, IT Risk Management Department, Integrated Risk Management Department dan Model Validation.



Struktur Satuan Kerja Manajemen Risiko

Sejak tahun 2015, pelaksanaan kegiatan manajemen telah menerapkan dan mendapatkan sertifikasi ISO 9001:2008 yang telah diupgrade menjadi ISO 9001:2015 pada Bulan Mei tahun 2018. Sertifikasi juga terus dilakukan pemeliharaan setiap tahun dilakukan audit tahunan terhadap pelaksanaan sertifikasi ISO 9001:2015 dengan tetap menguatkan komitmen untuk terus bekerja sesuai dengan standar mutu yang diterapkan dengan melakukan perbaikan secara berkesinambungan, menumbuhkan budaya risiko dan mendorong penerapan manajemen risiko yang efektif di seluruh tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Saat ini ISO 9001:2015 telah digunakan oleh berbagai organisasi di seluruh dunia, yang dapat membantu mereka menjalankan operasional yang lebih efisien dan menguntungkan. ISO 9001:2015 menyediakan *framework* untuk performa bisnis yang lebih konsisten, pelayanan yang prima serta perbaikan berkesinambungan untuk jangka waktu yang lama. ISO 9001:2015 menyediakan banyak keuntungan dan kapabilitas dalam hal skala usaha dalam beberapa tahun belakangan. Standar ini merupakan alat yang sangat membantu dalam pengembangan perusahaan dan membuat organisasi Bank BTN menjadi lebih *resilient*.

Credit Portfolio Risk Management Department berfungsi memastikan efektivitas pengelolaan Risiko Kredit Perseroan yang fokus utamanya di bidang pemberian kredit atau pembiayaan perumahan, portfolio asetnya didominasi oleh Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang dipengaruhi oleh adanya perubahan iklim bisnis eksternal.

Market Risk Management Department berfungsi memastikan efektivitas pengelolaan Risiko Pasar dan Risiko Likuiditas yang antara lain menetapkan rencana yang akan dilakukan apabila Perseroan mengalami kondisi tekanan keuangan (*financial stress*) yang dapat membahayakan kelangsungan usaha.

Operational Risk Management Department berfungsi memastikan efektivitas pengelolaan Risiko Operasional secara keseluruhan Bank termasuk berkoordinasi dengan *Operations Risk Controller Management* dan IT Risk Management. Selain itu berfungsi dalam mengelola Risiko Hukum, Risiko Kepatuhan dan Risiko Reputasi yang ada di Perseroan.

Integrated Risk Management Department memastikan efektivitas pengelolaan Risiko Strategik dan berfungsi mengkoordinasikan dan memastikan proses integrasi manajemen risiko dengan perencanaan strategis, pengukuran kinerja dan pemberian insentif dalam rangka meningkatkan *shareholder value*, meningkatkan *investor confidence*, mendukung proses pengambilan keputusan dan meningkatkan efisiensi penggunaan modal.

Model Validation berfungsi untuk melakukan evaluasi atas akurasi dan validitas model yang dimiliki oleh Bank serta memastikan kelayakan model yang digunakan Perseroan. Selain itu, berfungsi untuk memastikan pengelolaan setiap risiko yang dikelola sesuai dengan Standar Mutu Manajemen ISO 9001:2015.

Operations Risk Controller Management Department berfungsi sebagai *control tower* terhadap aktivitas pengawasan dan evaluasi atas penerapan pengendalian internal di Kantor Cabang (KC) dan *Commercial Banking Center* (CBC) yang

dijalankan oleh *Branch Business Control (BBC)*, *Commercial Banking Center – Business Control (CBC-BC)* dan *Regional Loan Processing Center Business Control (RLPC-BC)* yang merupakan organ *monoline* Kantor Wilayah.

IT Risk Management Department berfungsi untuk memastikan efektivitas pengelolaan risiko IT, Digital & Cyber yang melekat pada solusi teknologi yang digunakan oleh Perseroan untuk mencapai layanan teknologi yang aman dan handal. Terdapat 7 domain risiko yang menjadi cakupan, yaitu, risiko *information and cyber security*, risiko *IT service delivery, resilience, and continuity*, risiko *IT third party*, risiko *data privacy*, risiko *IT project delivery*, risiko *IT regulatory compliance*, risiko *IT benefit/Value enablement*. Pengelolaan risiko dilakukan melalui *framework* yang sesuai dengan *best practice* industri dan terintegrasi dengan siklus hidup layanan TI untuk mencapai hasil yang maksimal.

ESG Department berfungsi sebagai *control tower* terhadap aktivitas ESG agar sejalan dengan *roadmap* dan *framework* ESG yang telah dimiliki Perseroan. *Control tower* dilakukan terhadap aktivitas bisnis dan operasional untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang antara lain berkaitan dengan pengelolaan dampak lingkungan, mengatasi masalah sosial dan mempertahankan standar tata kelola yang bertanggung jawab dan etis dalam operasi perbankan.

Pada Desember 2023, Dewan Komisaris telah menyetujui penetapan perubahan struktur organisasi Tahap I terkait penguatan kapabilitas digital banking dan ESG yang diimplementasikan pada bulan Januari 2024 sehingga Struktur Organisasi dibawah Direktur Risk Management adalah: Retail Credit Risk, Wholesale Credit Risk, Enterprise & ESG Risk Management, Digital & Operation Risk Management, dan Transformation & Partnership Management.



Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Kerja Manajemen Risiko

Satuan Kerja Manajemen Risiko merupakan satuan kerja yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur yang membawahi fungsi Manajemen Risiko dan bersifat independen terhadap Satuan Kerja Operasional yang merupakan *risk-taking unit*, Satuan Kerja Audit Internal dan Satuan Kerja Kepatuhan. Tanggung Jawab Satuan Kerja Manajemen Risiko meliputi:

1. Memberikan masukan kepada Direksi dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko.
2. Mengembangkan prosedur dan alat untuk identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko
3. Merancang dan menerapkan perangkat yang dibutuhkan dalam penerapan Manajemen Risiko.
4. Memantau implementasi kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko yang direkomendasikan oleh Komite Manajemen Risiko dan yang telah disetujui oleh Direksi.
5. Memantau posisi/eksposur Risiko secara keseluruhan, maupun per Risiko termasuk pemantauan kepatuhan terhadap toleransi Risiko dan limit yang ditetapkan.
6. Melakukan *stress testing* guna mengetahui dampak dari implementasi kebijakan dan strategi Manajemen Risiko terhadap portofolio atau kinerja Bank secara keseluruhan.
7. Mengkaji usulan aktivitas dan/atau produk baru yang dikembangkan oleh unit lain. Pengkajian difokuskan terutama pada aspek kemampuan Bank untuk mengelola aktivitas dan/atau produk baru termasuk kelengkapan sistem

dan prosedur yang digunakan serta dampaknya terhadap eksposur Risiko Bank secara keseluruhan.

8. Memberikan rekomendasi kepada satuan kerja bisnis dan/atau kepada Komite Manajemen Risiko terkait penerapan Manajemen Risiko antara lain mengenai besaran atau maksimum eksposur Risiko yang dapat dipelihara serta melakukan eskalasi sesuai kebutuhan.
9. Mengevaluasi terhadap akurasi model dan validitas data yang digunakan untuk mengukur Risiko.
10. Menyusun dan menyampaikan laporan profil Risiko kepada Regulator, Dewan Komisaris, Direksi dan Komite Manajemen Risiko secara berkala atau paling kurang secara triwulanan. Frekuensi laporan ditingkatkan apabila kondisi pasar berubah dengan cepat.
11. Melaksanakan kaji ulang secara berkala dengan frekuensi yang disesuaikan kebutuhan Bank, untuk memastikan:
 - a. kecukupan kerangka Manajemen Risiko;
 - b. keakuratan metodologi penilaian Risiko; dan
 - c. kecukupan sistem informasi Manajemen Risiko.
12. Memiliki Taksonomi Risiko bagi Bank dan anak perusahaan Bank yang terintegrasi sesuai dengan kebutuhan pengawasan target kinerja Bank dan anak perusahaan Bank.
13. Struktur organisasi, tugas dan tanggung jawab serta hal-hal lain termasuk tata laksana pekerjaan satuan kerja Manajemen Risiko diatur dalam suatu peraturan internal tersendiri.

Profil Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko

Kepala Enterprise Risk Management Division sekaligus berperan sebagai sekretaris Komite Manajemen Risiko yang berada di bawah Direksi, dijabat oleh Wilson Arafat berdasarkan SK Direksi No. 63/KUASA/DIR/2021 tanggal 30 Juli 2021 dan menjabat sampai dengan sekarang.



WILSON ARAFAT

Kepala Enterprise Risk Management Division

Warga Negara Indonesia, berusia 49 tahun, berdomisili di Kota Jakarta



Riwayat Pendidikan

- Magister Manajemen Pemasaran Universitas Gadjah Mada (2004).
- S1 Ekonomi Pembangunan Universitas Gadjah Mada (1996).



Pengalaman Kerja

- Transformation Management Office Head (2017-2018)
- Procurement & Fixed Asset Management Division Head (2019 – 2021)
- Enterprise Risk Management Division Head (2021 - Sekarang)
- PLT Transformation & Partenership Management Division (2023 - sekarang)



Dasar Hukum Pengangkatan

- SK Direksi No. 63/KUASA/DIR/2021 tanggal 30 Juli 2021



Sertifikasi

- Sertifikasi Training for Trainer Manajemen Risiko KKNJ Jenjang 6 dan 7, BARa (2023)
- Certification for Credit Risk Management, Resolusi Akusara Nusantara (2022)
- Manajemen Risiko Level IV, BSMR (2021)
- Sertifikasi GRC Professional, OCEG (2016)
- Certified Human Resource Professional (CHRP), Lutan Education-GML Performance Consulting (2011)
- Training & Directorship Certification, LKDI (2011)
- Certificate of Accomplishment Professional Director, IICD (2011)
- Certified Strategy Execution Professional (CSEP), Lutan Education-GML Performance Consulting (2010)

Pengembangan Kompetensi Bidang Manajemen Risiko

Di bidang pengembangan sumber daya manusia, Perseroan telah melaksanakan program pengembangan SDM di bidang pendidikan dan pelatihan bagi pejabat manajemen risiko dan mengikutsertakan seluruh pegawai (sesuai *job specification*) termasuk di ERMD dalam rangka sertifikasi manajemen risiko.

Perseroan secara berkala mengadakan pendidikan dan pelatihan sertifikasi manajemen risiko serta aktif mengikutsertakan staf dan pejabatnya sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Bank Umum dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/SEOJK.03/2022 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko bagi Sumber Daya Manusia Bank Umum bahwa dasar penetapan minimal level sertifikasi UKMR untuk suatu *job title* adalah berapa level *job title* tersebut dari Direksi sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku sehingga level minimal sertifikasi untuk *job title* tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Perseroan juga melakukan *in-house training* dan melakukan *pre-test* sebagai saringan awal bagi pejabat dan pegawai yang akan mengikuti ujian sertifikasi manajemen risiko yang diselenggarakan LSPP (Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan). Selama tahun 2023 pegawai Satuan Kerja Manajemen Risiko telah mengadakan pelatihan dan pengembangan kompetensi bidang Manajemen Risiko sebagai berikut:

No.	Nama Pelatihan
1	<i>Forecasting Credit Portfolio</i>
2	<i>Awareness Training</i> ISO 9001 2015 dan Internal Audit
3	<i>Backtesting</i> Model PD PSAK 71
4	<i>Forecasting Credit Portfolio</i>
5	Pelatihan dan Pendidikan PPDigital
6	Pelatihan <i>Refreshment</i> Proses Bisnis Bank BTN Tahun 2023
7	Pelatihan Standar Internasional Manajemen Risiko Fundamental ERM
8	Pembekalan dan Ujian Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1
9	Pembelajaran Credit Scoring
10	<i>Practical Microsoft Excel for Data Scientist and Effective Data Report</i>
11	<i>Training SAS VIYA : Interactive Model Building</i>
12	SespiBank
13	Seminar <i>Sustainable Finance</i> Forum 2023
14	<i>Refreshment</i> Sertifikasi Manajemen Risiko
15	<i>Refreshment</i> Subsidi Bunga/Bunga Margin
16	<i>Leadership Forum "Envisioning Culture For Leader"</i>
17	Workshop ESG Bank BTN
18	<i>Risk Economic Outlook 2024</i>
19	Webinar <i>Security Awareness Cyber Crime</i>
20	GRC Masterclass "Pre IPO & Post IPO"
21	<i>Training for Trainers</i> Manajemen Risiko

Sertifikasi Manajemen Risiko

No	Level Mandatory	Jumlah Pegawai	Mapping Level SMR					Kesesuaian
			Belum SMR	Jenjang 4	Jenjang 5	Jenjang 6	Jenjang 7	
1	Mandatory Jenjang 4	2.816	694	506	1.616	-	-	75,36%
2	Mandatory Jenjang 5	418	5	35	345	30	3	90,43%
3	Mandatory Jenjang 6	8	-	4	1	1	2	37,50%
4	Mandatory Jenjang 7	12	-	-	-	1	11	91,67%
Total Pegawai		3.254	699	545	1.962	32	16	77,26%

Keterangan:

- Pegawai yang diwajibkan sertifikasi namun belum disertifikasi sesuai levelnya
- Pegawai yang diwajibkan sertifikasi dan sudah sesuai dengan levelnya
- Pegawai yang diwajibkan sertifikasi dan sudah memiliki sertifikasi dengan level di atas yang diwajibkan

Pelaksanaan Tugas Satuan Kerja Manajemen Risiko Tahun 2023

Bank BTN selama 2023 dalam penerapan manajemen risiko ditujukan untuk memperkuat pilar-pilar pengelolaan risiko dengan mengedepankan prinsip – prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam aktivitas operasional bisnis bank. Target dan inisiatif strategis terkait pelaksanaan manajemen risiko pada tahun 2023, sebagai berikut:

Penguatan Tata Kelola Risiko (<i>Risk Government</i>)						
Penetapan, Pengelolaan, <i>alignment framework</i> RA RT dan RKAP; Peguatan Segregation of Duty dan 3 LoD Pengawasan aktif Dewan Komisaris & Direksi melalui <i>performance Review</i> , transformasi <i>corporate plan</i> serta monitoring &evaluasi RA dan RT						
Penguatan Kerangka Manajemen Risiko						
Transformasi arsitektur kebijakan (penyusunan kebijakan umum manajemen risiko (KUMR) Linking Strategy (Corplan, RBB, RKAP, KPI) dengan RA, RT dan Limit						
Evaluasi struktur organisasi risk management dengan penambahan fungsi operasional <i>risk control</i> , IT, <i>cyber & digital risk</i> , Serta <i>validation Model</i>						
Penguatan Proses Manajemen Risiko, Sistem informasi & SDM						
Pengelolaan Risiko Kredit	Pengelolaan Risiko Pasar & Likuiditas	Pengelolaan Risiko Operasional, hukum, Kepatuhan dan Reputasi	Pengelolaan Risiko Strategik	Pengelolaan Risiko IT, Cyber dan Digital	Pengelolaan Risiko Darurat (BCM)	Pengelolaan Tata Kelola Model
√. Kajian Risiko BPI (<i>Credit Consumer & Commercial</i>) √. Remodelling <i>Credit Scoring</i> model √. Pengembangann <i>Commercial Loan EWS</i> dan <i>Underwriting</i> √. Pengembangan SME Credit Scoring & <i>Collection Scoring</i> √. Uji Coba ATMR kredit Sesuai POJK baru √. Strategi pengelolaan LAR dan Penguatan CKPN to NPL √. Pelaksanaan portofolio <i>Quality Report</i> √. Pengembangan dan Penerapan <i>Credit Decision Engine</i> √. Membangun <i>Collection</i> dan <i>Asset sals strategy</i> untuk SME	√. Pengelolaan Risiko Pasar melalui Pengembangan dan penerapan <i>middle office</i> √. Pengelolaan manajemen risiko likuiditas secara harian √. Pelaksanaan Internal Liquidity Adequacy Assesment Process (ILAAPP) √. Uji Coba ATMR Pasar Sesuai POJK baru	√. Penerapan dan penilaian risiko produk sesuai POJK √. Uji coba ATMR Operasional Sesuai POJK baru √. Membangun sistem operasional tools (LED, RCSA & KRI) - ORMIS √. Implementasi Branch & Regional Operation Risk Control untuk memperkuat manajamen risiko operasional √. Pengelolaan Operasional, Hukum & Reputasi melalui penambahan cadangan √. <i>Risk Assesment</i> PAB √. Penguatan fungsi Credit Operation √. Sentralisasi fungsi akunting dan pengadaan √. Membangun kapabilitas data analitik serta infrastruktur big data	√. Melaksanakan (<i>Join Stress Test [JST]</i>), KBUMN. Internal, Restru Covid, Tapering Off) √. Membangun SIM Risiko sesuai KBUMN (RMI) √. Pengukuran Risk Maturity Index (RMI) √. Pelaksanaan monev RA & RT √. Implementasi <i>blueprint & roadmap</i> Risiko <i>enviromental, social & governance</i> (ESG) √. <i>Self Assesment</i> TKB √. Penguatan Budaya Sadar Risiko	√. Penguatan kapabilitas pengelolaan manajemen risiko IT, Cyber, & Digital (Sesuai fungsi LoD) √. Menetapkan <i>roadmap</i> dan <i>stages</i> pengembangan 2021-2025 √. Implementasi <i>Roadmap IT Risk</i> (Stages I, II, dan III)	√. Evaluasi Pengelolaan BCM √. Pelaksanaan <i>Business Impact analysis</i> √. Pengelolaan <i>Business Continuity Plan</i> √. Pengelolaan <i>Disaster Recovery</i>	√. Penguatan tata kelola model pada Bank sesuai dengan ketentuan regulator √. Pengelolaan seluruh model yang dimiliki oleh Bank, baik model risiko maupun model non risiko √. Pelaksanaan akurasi dan validitas model yang dimiliki Bank √. Memastikan kelayakan model yang digunakan oleh Bank √. Memastikan seluruh Pengelolaan setiap risiko yang dikelola sesuai dengan Standar Mutu Manajemen ISO 2015:9001
Melaksanakan <i>Join Stress Test [JST]</i> , KBUMN, <i>Internal Restru Covid, Tap Off</i>	Membangun sistem informasi manajemen Risiko sesuai dengan KBUMN dan RMI	Penyusunan Risiko <i>Enviromental, Social & Governance</i> (ESG) dan Perubahan Iklim	<i>Job Enrichment Talent Movement</i> dan Resertifikasi ISO 9001:2015 dan <i>Risk Culture</i>	Pelaksanaan <i>Recovery plan & Resolution Plan</i>		
Penguatan Sistem Pengendalian Risiko						

Dalam pelaksanaan tugas selama tahun 2023 selain pilar-pilar inisiatif strategis tersebut di atas, pelaksanaan manajemen risiko juga telah dilakukan beberapa perbaikan sebagai berikut:

Penetapan *Risk Appetite Statement* (RAS) dan Limit Risiko

Dalam penyusunan kebijakan dan strategi Manajemen Risiko, Direksi Bank telah menetapkan *Risk Appetite Statement* (RAS) dan limit risiko lainnya. RAS dikaji ulang setiap tahun atau sewaktu-waktu dengan memperhatikan perubahan rencana dan tujuan bisnis Bank serta perubahan kondisi lingkungan bisnis. RAS digunakan sebagai panduan objektif dalam membuat keputusan strategis terkait dengan pengelolaan risiko dan sebagai perangkat bagi Manajemen dalam melaksanakan tata kelola bisnis dengan baik. Selanjutnya RAS diturunkan menjadi limit risiko untuk setiap indikator risiko. Penetapan RAS dan limit risiko dilakukan dengan memperhatikan tingkat risiko yang akan diambil maupun strategi dan target Bank secara keseluruhan.

Limit risiko yang ditetapkan meliputi Risiko secara keseluruhan (komposit), per jenis Risiko, dan per-aktivitas fungsional. Adapun penetapan limit risiko digunakan sebagai panduan bagi aktivitas Unit Kerja untuk mengelola jenis dan jumlah risiko yang dapat diterima.

Penginian Rencana Aksi (*Recovery Plan*)

Penyusunan Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Perseroan Sistemik Sebagai salah satu Bank Sistemik di Indonesia, Perseroan memiliki kewajiban untuk menyusun dokumen Rencana Aksi (*Recovery Plan*) yang diatur dalam POJK No. 14/POJK.03/2017 Tentang Rencana Aksi. Dokumen Rencana Aksi yang disusun memuat mekanisme yang diharapkan dapat mencegah, memulihkan, dan/atau memperbaiki kondisi finansial Perseroan sebagai akibat dari krisis keuangan atau gangguan pasar finansial lainnya yang berdampak pada permodalan, likuiditas, rentabilitas dan kualitas aset yang membahayakan kelangsungan usaha Perseroan. Perseroan secara berkala melakukan penginian Dokumen Rencana Aksi (*Recovery Plan*) sebagai salah satu rencana dalam perencanaan keuangan berkelanjutan. Pada 30 November 2023 Bank telah menyampaikan Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Tahun 2024 kepada Regulator.

Tindak Lanjut Uji *Resolvabilitas* pada Rencana Resolusi (*Resolution Plan*)

Penyusunan Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) Perseroan Sistemik telah disampaikan Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) sebagai bank yang berkewajiban untuk menyusun dokumen Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) sesuai Peraturan Lembaga Penjaminan Simpanan No. 1 Tahun 2021 tentang Rencana Resolusi Bank Umum. Dokumen Rencana Resolusi yang disusun memuat informasi mengenai bank dan strategi resolusi yang menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi Lembaga Penjaminan Simpanan dalam melakukan penanganan atau penyelesaian Bank yang ditetapkan sebagai bank gagal. Lembaga Penjaminan Simpanan telah melakukan uji *resolvabilitas* atas Rencana Resolusi (*Resolution Plan*) Bank dan selama tahun 2023 Perseroan melakukan tindak lanjut atas rekomendasi hasil uji *resolvabilitas*.

Review Kebijakan Manajemen Risiko

Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, dalam mengelola risiko bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif. Untuk menerapkan manajemen risiko secara efektif, Perseroan telah menyusun kebijakan manajemen risiko yang tertuang dalam suatu kebijakan manajemen risiko dan sekurang-kurangnya setiap tahun dilakukan *review* dan/atau penginian beberapa kebijakan manajemen risiko agar mudah dipahami oleh *risk owner* maupun *risk manager* sebagai pedoman dalam melaksanakan. Perseroan telah menyelaraskan struktur kebijakan internal sesuai dengan Transformasi Arsitektur Kebijakan dan Prosedur dimana kebijakan dan prosedur disesuaikan dengan hirarki kebijakan dari yang tertinggi Kebijakan Umum, Kebijakan Khusus dan Peraturan Teknis. Perseroan memiliki Satuan Kerja Policy dan Prosedur dalam melakukan *review* dan pemantauan Kebijakan dan Prosedur secara berkala.

Penerapan Modal Minimum Risiko Kredit Basel III Reform Pendekatan Standar

Perseroan telah menerapkan perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Kredit sesuai SEOJK No 24/SEOJK.03/2021 tanggal 7 Oktober 2021 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan menggunakan Pendekatan Standar Bagi Bank Umum. Perubahan metodologi perhitungan dalam ketentuan tersebut meliputi perubahan bobot risiko lebih granular dan dalam jumlah bucket yang lebih banyak. Selain itu juga terdapat klasifikasi kategori portofolio yang lebih beragam dan keharusan pelaksanaan *due diligence* terhadap pihak lawan untuk memastikan pemahaman atas profil risiko dan karakteristik dari pihak lawan agar penentuan bobot risiko tidak hanya bergantung pada peringkat eksternal.

Persiapan Penerapan Modal Minimum Risiko Pasar Pendekatan Standar

Dalam rangka penerapan SEOJK No. 23/SEOJK.03/2022 tanggal 7 Desember 2022 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Pasar Bagi Bank Umum yang akan diterapkan mulai 1 Januari 2024, maka Bank telah melakukan uji coba perhitungan dan melaporkan kepada OJK untuk ATMR Pasar posisi bulan Juni 2023, September 2023 dan Desember 2023.

Penerapan Modal Minimum Risiko Operasional Pendekatan Standar

Dalam rangka penerapan SEOJK No. 6/SEOJK.03/2020 tanggal 29 April 2020 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Operasional Dengan Menggunakan Pendekatan Standar Bagi Bank Umum telah diimplementasikan sejak 1 Januari 2023, maka secara berkala Bank melakukan *reviu* pencatatan data kerugian dan *recovery* kerugian risiko operasional.



Implementasi *Early Warning System* (EWS) untuk Segmen Kredit UMKM, Komersial dan Korporasi

Early Warning System adalah suatu mekanisme atau sistem deteksi atau pengenalan terhadap tanda-tanda atau gejala awal yang diperkirakan dapat mempengaruhi perkembangan atas maju mundurnya kondisi usaha debitur. *Early Warning System* dilakukan untuk meminimalisir dan mencegah terjadinya kerugian akibat kredit macet, maka Perseroan harus menerapkan suatu sistem yang efektif dan berkesinambungan untuk *monitoring* fasilitas kredit yang telah diberikan.

Dalam hal ini, Satuan Kerja Manajemen Risiko bersama dengan unit bisnis terkait secara rutin melakukan *monitoring* kualitas portfolio dan indikator *early warning* terhadap kualitas aset atas portfolio kredit. Upaya ini diharapkan dapat digunakan untuk melakukan *monitoring* terhadap debitur kredit UMKM, Komersial, dan Korporasi sehingga memberikan informasi berupa peringatan lebih awal terhadap kemungkinan kondisi debitur yang akan mengalami gagal bayar (*default*).

Penyusunan dan Implementasi *Portfolio Guideline* untuk Segmen Komersial, Korporasi dan *Financial Institutions*

Langkah Perseroan dalam memperkuat manajemen risiko pembiayaan untuk mengendalikan komposisi portfolio kredit dan memastikan laju pertumbuhan portfolio kredit yang sehat maka Bank BTN melakukan pengelolaan risiko kredit melalui *Portfolio Guideline* agar dapat menghindarkan bank dari bahaya risiko konsentrasi. *Portfolio Guideline* merupakan inisiatif strategis dalam penyaluran pembiayaan untuk selalu memperhatikan kondisi makro ekonomi yang terkini terutama pada sektor-sektor tertentu yang dinilai masih layak untuk dibiayai termasuk beberapa sektor yang dapat digunakan sebagai sektor-sektor prioritas termasuk di dalamnya aspek analisa dan *monitoring* terhadap NPF per sektor industri, limit pembiayaan per sektor industri dan prospek sektor industri dalam mendukung perkembangan usaha bisnis Perseroan.

Pengembangan *Credit Scoring Model* (CSM) untuk Segmen *Small Medium Enterprise* (SME)

Dalam upaya meminimalisir risiko yang akan diterima oleh Perseroan dalam pemberian kredit kepada segmen SME maka diperlukan suatu *Credit Scoring Model* (CSM). Adanya *Credit Scoring Model* SME digunakan untuk membantu dalam menganalisa dan mengkuantifikasi kelayakan calon debitur dengan hasil rekomendasi berupa *High Risk* maupun *Low Risk*.

Penguatan *Regional Business Control* (RBC), *Branch Business Control* (BBC), *Commercial Banking Center Business Control* (CBC-BC), dan *Regional Loan Processing Centre Business Control* (RLPC-BC)

Perseroan telah memiliki organ untuk meningkatkan pengawasan risiko operasional dan mitigasi/pencegahan *operational loss* dengan implementasi Departemen *Operations Risk Controller* pada Satuan Kerja Manajemen Risiko dan menempatkan organ *Regional Business Control* (RBC) pada Kantor Wilayah, *Branch Business Control* (BBC) yang merupakan *monoline*

Kantor Wilayah dan bertugas pada Kantor Cabang maupun Kantor Cabang Syariah, *Commercial Banking Center Business Control* (CBC-BC) yang merupakan *monoline* Kantor Wilayah dan bertugas pada *Commercial Banking Center* (CBC) serta *Regional Loan Processing Centre Business Control* (RLPC-BC) yang merupakan *monoline* Kantor Wilayah dan bertugas pada *Regional Loan Processing Centre*.

Penguatan organ *Business Control* secara berkesinambungan telah dilakukan dengan prioritas risiko secara periodik (*Top 10 Risk*) yang dilaporkan kepada Direksi. Perseroan juga berencana untuk membentuk *Operational Risk Control* pada level direktorat sebagai bagian dari mitigasi risiko operasional pada level direktorat.

Penyusunan dan Penguatan Tata Kelola Model

Dalam rangka menguatkan tata kelola model, Perseroan telah menyusun ketentuan dan *framework* mengenai tata kelola model guna meningkatkan kualitas penerapan manajemen risiko pada Perseroan. Selain itu, dengan adanya penguatan tata kelola model dapat mengimplementasikan *segregation of duties* dalam *lifecycle* model, dimana ketentuan Perseroan telah memisahkan fungsi, tugas dan tanggung jawab antara fungsi pengembangan model, pelaksanaan operasional model, evaluasi dan validasi model sehingga pengelolaan model lebih independen.

IT, Digital & Cyber Risk

Pada 2023, Perseroan telah melakukan penguatan dalam pengelolaan risiko IT, digital & siber dengan melakukan pemantauan profil risiko IT, digital & siber, dan menjalankan program penguatan pengendalian risiko serangan digital dan siber. Komponen profil risiko IT, digital & siber dikembangkan menjadikan ketentuan OJK yang berlaku sebagai dasar, dan melakukan pengembangan yang diperlukan untuk menyesuaikan dengan kondisi Perseroan dan terhubung dengan *matriks key risk indicator* yang telah dibentuk. Pelaporan atas *risk profile* dan *key risk indicator* dilakukan secara berkala kepada *Management* untuk memberikan visibilitas yang *comprehensive*.

Penguatan pengendalian risiko serangan digital dan siber dilakukan dengan pendekatan 3 pilar transformasi, yaitu *people*, *proses*, dan teknologi. Dari sisi *people*, penguatan dilakukan melalui program internalisasi pengelolaan risiko IT, digital & siber yang bertujuan menyampaikan *tone at the top* dari Direksi kepada seluruh pegawai, dan membekali pegawai dengan meningkatkan kesadaran pegawai atas ancaman IT, digital & Siber beserta cara pencegahannya. Dari sisi proses, Perseroan telah melakukan penguatan atas proses internal yang berhubungan dengan IT dan Digital seperti melakukan kajian atas kebijakan dan prosedur yang berhubungan dengan IT dan digital, melakukan pemantauan risiko atas proyek IT yang bersifat stratejik. Dari sisi teknologi, Perseroan melakukan peningkatan atas *tools* dan juga *rule* yang sudah diimplementasi untuk meningkatkan penjagaan aset komputer Perseroan.

Direksi melalui Komite Pengarah Teknologi Informasi melakukan evaluasi atas risiko IT, digital & siber yang dilaksanakan melalui

rapat secara berkala paling kurang 4 (empat) kali selama tahun berjalan dengan salah satu pembahasannya terkait IT Key Risk Indicator (KRI) Monitoring. Selanjutnya, Dewan Komisaris juga melakukan telaaah setiap setahun 1 (satu) kali terhadap hasil evaluasi atas risiko IT, digital & siber.

Melanjutkan Pengembangan dan Memperkuat Utilisasi Risk Management Tools

Untuk memperkuat utilisasi Risk Management Tools maka telah dilakukan beberapa pengembangan diantaranya:

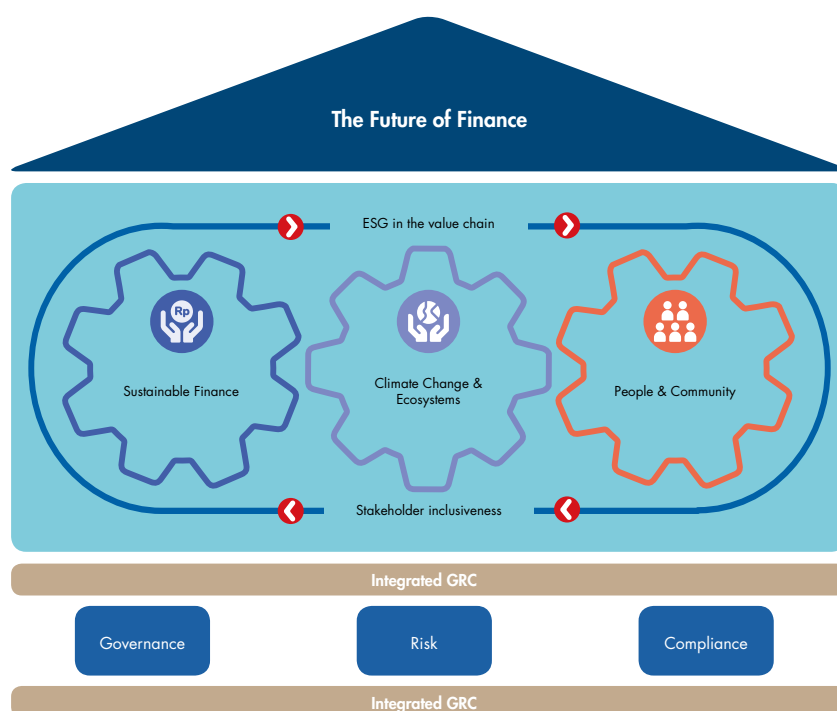
1. Implementasi sistem pemantauan monitoring risiko pasar/ *interest rate risk in the banking book* (IRRBB) dan Aplikasi monitoring Risiko Likuiditas.
2. Pemanfaatan *Terminal Bloomberg* untuk mendukung penerapan manajemen risiko secara efektif dalam mendukung pengelolaan risiko likuiditas, risiko kredit dan risiko lainnya.
3. Memperkuat peran manajemen risiko dengan Pengembangan *Sustainability Environment Risk Management*.
4. Melakukan *Enhancement Credit Scoring Model* (CSM) kredit consumer.
5. Melakukan pengembangan *Credit Scoring Model* (CSM) untuk segmen SME.
6. Melakukan pengembangan Early Warning Sistem untuk segmen Komersial dan Korporasi.
7. Melakukan *re-modeling Internal Credit Rating* yang untuk segmen Komersial dan Korporasi.
8. Melakukan pengembangan *Collection Scoring* untuk segmen Konsumer.
9. *Maintenance* implementasi ISO di ERMD melalui *Surveillance dan Resertifikasi ISO 9001:2015* di Satuan Kerja Manajemen Risiko untuk meningkatkan standar layanan mutu Satuan Kerja Manajemen Risiko kepada seluruh *stakeholders*.
10. Pemanfaatan aplikasi *Operational Risk Tools* yang terintegrasi sebagai upaya pengelolaan risiko operasional di Unit Kerja antara lain dengan *tools* LED, RCSA, dan KRI.
11. Melakukan pembuatan aplikasi *Fraud Detection System* yang berfungsi sebagai *tools* yang membantu Bank dalam proses *prevention, detection, investigation dan monitoring* atas *fraud* khususnya pada *transactional banking*.
12. Pemanfaatan visualisasi data Operational Risk dalam rangka prioritas risiko (*Top 10 Risk*) yang dapat digunakan oleh manajemen.
13. Penambahan fungsi data *analytics* sebagai dasar organ *Business Control* dalam melakukan *internal control testing*.

Pembentukan Fungsi ESG Management

Perseroan berfokus terhadap penerapan ESG yang ditunjukkan dengan melakukan perubahan struktur organisasi pada Enterprise Risk Management Division di November 2023, melalui pembentukan ESG Department. Fungsi ESG Management adalah sebagai *control tower* terhadap isu-isu ESG baik dalam proses bisnis dan operasional. Untuk menunjang kegiatannya, maka ESG Management memiliki 4 unit yaitu Framework & Strategy Development, Policy & Implementation, Data & Information, dan Reporting & Communication.

Framework, Strategi, Roadmap dan Quickwins ESG

Perseroan telah memiliki *framework, strategi, roadmap dan quickwins* ESG sebagai berikut:





"The Future of Finance" adalah *framework* ESG Perseroan merupakan seperangkat prinsip yang memberikan panduan bagi Perseroan dalam mengelola dan menjalankan praktik bisnis yang berorientasi pada kinerja dampak dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau *sustainable development goals*.

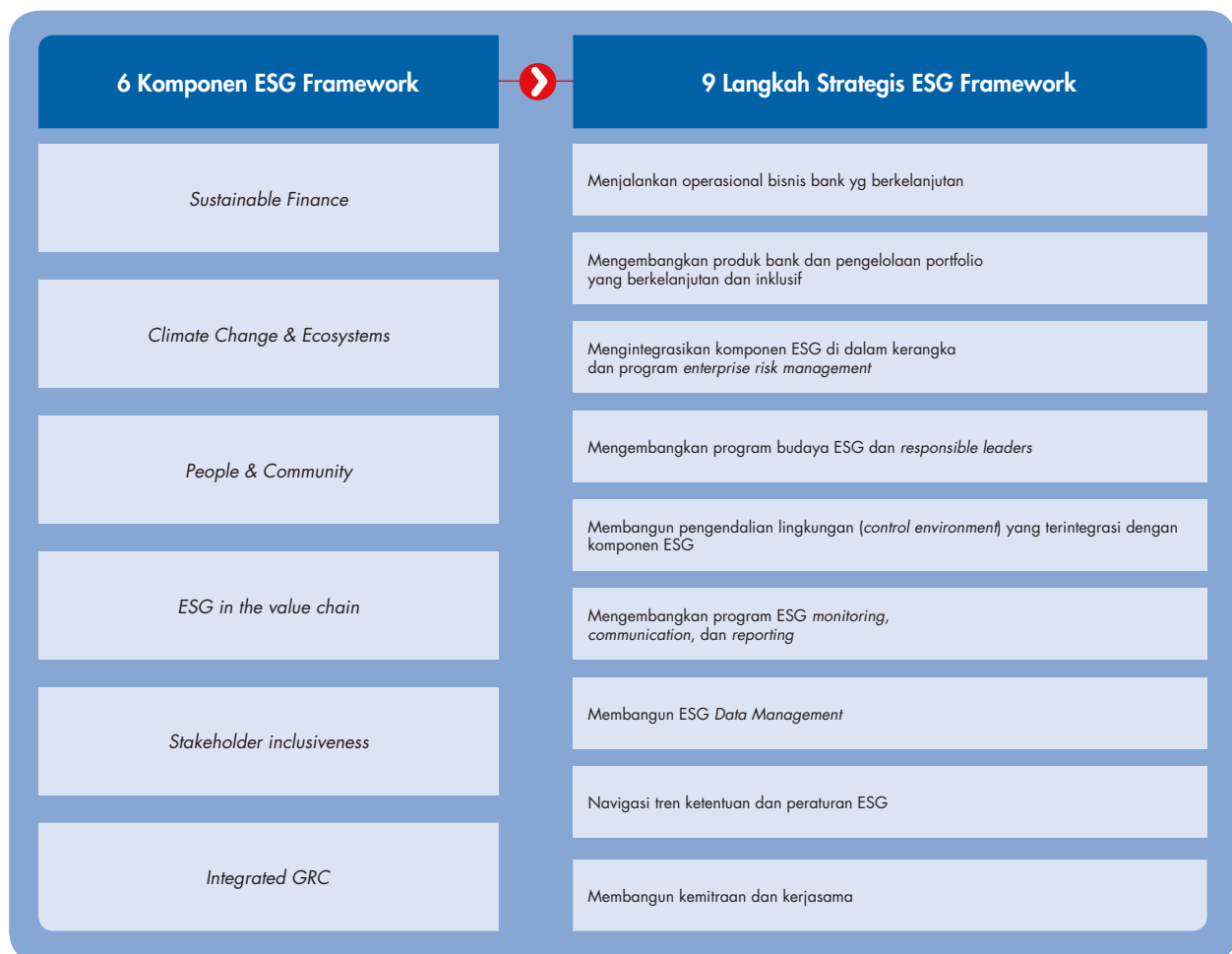
Framework ini menjadi landasan untuk mengelola aktivitas dan operasi bisnis serta proses pengambilan keputusan yang lebih komprehensif, termasuk:

- Pengelolaan produk dan jasa yang mendukung proses transisi menuju ekonomi rendah karbon serta menjaga keseimbangan sosial dalam membuka *equal* akses terhadap modal (*sustainable finance*);
- Pengelolaan risiko perubahan iklim dan dampaknya pada kapasitas ekosistem (*climate change and ecosystems*);

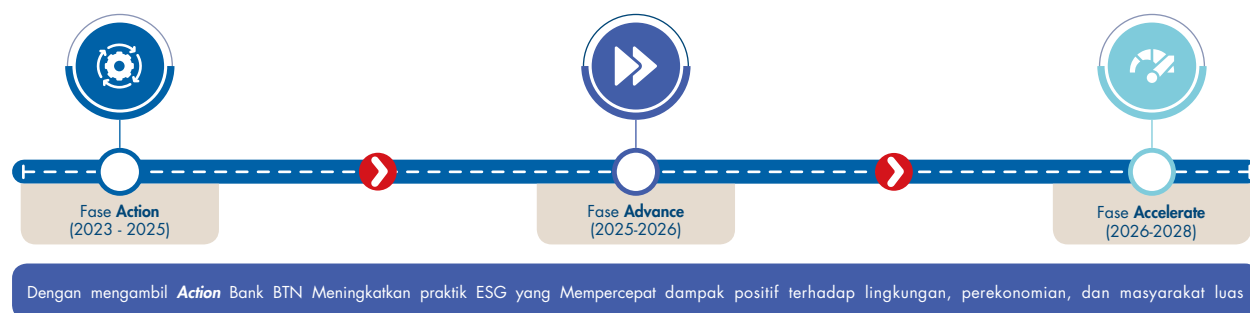
- Pengelolaan dampak pada manusia dan komunitas serta masyarakat luas pada umumnya (*people and community*).

Framework yang dibangun dilandasi pada kesadaran Perseroan dan pemangku kepentingan (*stakeholder inclusiveness*) di seluruh rantai nilai Perseroan (*ESG in the value chain*), yang membentuk sistem yang saling bergantung di mana hubungan tersebut menimbulkan risiko dan peluang terkait keberlanjutan bagi Perseroan yang perlu di kelola secara terintegrasi agar memungkinkan Perseroan dalam mencapai tujuan dan mengatasi ketidakpastian dengan *integrated GRC*.

Strategi ESG Perseroan merupakan langkah nyata Perseroan dalam mengimplementasikan *ESG framework* dengan menggunakan 9 (sembilan) langkah strategis yang akan diterapkan secara inklusif.



Mewujudkan “The Future of Finance” melalui implementasi *roadmap* yang dilakukan secara bertahap dan tepat sasaran dengan membagi berdasarkan 3 (tiga) fase, yaitu *Action*, *Advance* dan *Accelerate*.



Fase *action* didukung dengan Perseroan melakukan beberapa strategi *quickwins* antara lain:





Pelaksanaan *Stress Testing*

Perseroan secara berkala melakukan *Stress Testing* guna menilai ketahanan Perseroan terhadap skenario *stress*/krisis:

1. *Stress Testing* Internal untuk Risiko Kredit, Risiko Pasar, dan Risiko Likuiditas dilakukan secara semesteran.
2. *Reverse Stress Testing Recovery Plan* untuk Risiko Kredit, Risiko Pasar dan Risiko Likuiditas telah di-update untuk kebutuhan pelaporan Dokumen *Recovery Plan* pada November 2023.
3. Perseroan sedang mempersiapkan *internal control testing* yang akan dilakukan secara berkala sebagai upaya dalam memitigasi terjadinya risiko operasional pada Perseroan.
4. *Joint Stress testing* yang dilakukan dengan menggunakan data dan model internal Perseroan berdasarkan skenario dan asumsi dari Otoritas.

Pemantauan Manajemen Risiko Bank Wide secara Berkala

Perseroan senantiasa melakukan implementasi manajemen risiko sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum dimana Bank secara berkala melakukan pemantauan secara *bankwide* yang dibuktikan dengan beberapa *output* laporan wajib kepada Regulator diantaranya:

1. *Recovery Plan*;
2. *Resolution Plan*;
3. *Leverage Ratio*;
4. Profil Risiko;
5. Tingkat Kesehatan Bank;
6. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum sesuai Profil Risiko;
7. *Liquidity Coverage Ratio*;
8. *Net Stable Funding Ratio*;
9. Batas Maksimum Pemberian Kredit;
10. Aktiva Tertimbang Menurut Risiko;
11. Laporan-laporan kepada Kementerian BUMN; dan
12. Laporan *Adhock* lainnya.

Komite di Bawah Direksi

Perseroan membentuk dan menetapkan struktur serta keanggotaan Komite-Komite di bawah Direksi dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas Direksi. Komite-komite tersebut berperan dalam mempermudah *monitoring* dan menciptakan efektivitas pemecahan masalah serta pengembangan aspek yang dipandang strategis oleh Perseroan sesuai peraturan yang berlaku. Komite-Komite tersebut meliputi:

1. Komite Manajemen Risiko;
2. *Asset and Liability Management Committee* (ALCO);
3. Komite Kebijakan Perkreditan;
4. Komite Kredit;
5. Komite Human Capital;
6. Komite Pengarah Teknologi Infomasi (TI);
7. Komite Pengarah Transformasi;
8. Komite Bisnis;
9. Komite *Environmental, Social and Governance* (ESG).

Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko (KOMAR) berperan aktif dalam memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama terkait risiko yang melekat pada kebijakan yang akan ditetapkan Direksi maupun memberikan evaluasi terhadap ketentuan-ketentuan yang dinilai kurang sesuai dengan perkembangan terkini dan perlu dilakukan penyesuaian. KOMAR terlibat secara aktif dalam melakukan penilaian risiko yang melekat pada setiap produk dan/atau jasa/aktivitas baru sehingga Perseroan dapat melakukan langkah-langkah mitigasi yang diperlukan dan juga melakukan evaluasi terhadap Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko (PKMR).

Komite Manajemen Risiko merupakan Komite yang berperan dalam memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama untuk merumuskan kebijakan, strategi dan sasaran pengelolaan risiko serta sarana dalam melakukan *monitoring* dan pengambilan keputusan terkait pelaksanaan manajemen risiko Perseroan.

PEDOMAN KERJA KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Pedoman kerja Komite Manajemen Risiko mengacu pada Kebijakan Khusus Nomor KK.9-D tanggal 27 Maret 2023 tentang Prosedur Tata Kelola Komite Direksi. Pedoman tersebut antara lain mengatur terkait Tanggung Jawab Komite, Tugas dan Fungsi Komite, Kewenangan Komite, Tugas Ketua, Sekretaris dan Anggota Komite dan Tata Cara Pelaksanaan Rapat Komite.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Komite Manajemen Risiko bertanggung jawab atas keputusan yang diputus dalam Rapat Komite Manajemen Risiko, menyampaikan laporan atas Keputusan Signifikan yang dibuat kepada Rapat Direksi, serta menetapkan langkah-langkah perbaikan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penerapan manajemen risiko di Perseroan.

Tugas Komite Manajemen Risiko adalah melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama terkait manajemen risiko yang paling sedikit meliputi:

1. Penyusunan Kebijakan Manajemen Risiko serta perubahannya, termasuk strategi manajemen risiko dan *contingency plan* apabila terjadi kondisi eksternal yang tidak normal. Penyusunan dimaksud dilakukan bersama-sama dengan Division/Desk Head unit kerja operasional dan Enterprise Risk Management Division Head.
2. Perbaikan atau penyempurnaan penerapan manajemen risiko yang dilakukan secara berkala maupun bersifat insidental sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi eksternal dan internal Perseroan yang mempengaruhi kecukupan permodalan dan profil risiko Perseroan serta hasil evaluasi terhadap efektivitas penerapan tersebut.

3. Penetapan keputusan-keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal (*Irregularities*), seperti keputusan pelampauan ekspansi usaha yang signifikan dibandingkan dengan rencana bisnis bank yang telah ditetapkan sebelumnya atau pengambilan posisi/eksposur risiko yang melampaui limit yang telah ditetapkan.
4. Memantau dan pengelolaan risiko.
5. Strategi pengelolaan risiko yang terintegrasi dengan kecukupan modal.
6. Menetapkan *framework* dan metodologi manajemen risiko.

STRUKTUR KEANGGOTAAN KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Komite Manajemen Risiko diatur dalam Kebijakan Khusus Nomor KK.9-D tanggal 27 Maret 2023 tentang Prosedur Tata Kelola Direksi, dengan susunan sebagai berikut:

Struktur	Jabatan	Hak Suara	Keterangan
Ketua (Merangkap Anggota Tetap)	Direktur yang membawahi Manajemen Risiko	√	Anggota Tetap
Direksi / SEVP (Anggota Tetap)	Direktur yang membawahi Aset Manajemen*	√	Anggota Tetap
	Direktur yang membawahi Keuangan**	√	Anggota Tetap
	Direktur yang membawahi Kredit dan Pembiayaan	√	Anggota Tetap
	Direktur yang membawahi Dana dan Jaringan	√	Anggota Tetap
	Direktur yang membawahi <i>Institutional Banking</i>	√	Anggota Tetap
	Direktur yang membawahi <i>Human Capital</i> , Kepatuhan dan Hukum	x	Anggota Tetap
	Direktur yang membawahi Teknologi Informasi	√	Anggota Tetap
	SEVP yang membawahi <i>Wholesale Banking</i>	√	Anggota Tetap
Direksi / SEVP (Anggota tidak Tetap)	SEVP yang membawahi Operasional	√	Anggota tidak Tetap
	SEVP yang membawahi <i>Compliance dan Legal</i>	x	Anggota tidak Tetap

Keterangan:

Apabila Direktur Utama/Wakil Direktur Utama menghadiri Rapat Komite Manajemen Risiko maka Direktur Utama/Wakil Direktur Utama bertindak sebagai ketua dan mempunyai hak suara.

*) Ketua Pengganti I

**) Ketua Pengganti II

PROFIL ANGGOTA KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Profil anggota Komite Manajemen Risiko baik yang berasal dari Direksi dan SEVP Perseroan dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan di bagian Profil Direksi dan Profil Pejabat Satu Level di Bawah Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

INDEPENDENSI KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Seluruh anggota Komite Manajemen Risiko tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Perseroan, yang dapat mempengaruhi kemampuan bertindak independen.

TRANSPARANSI RANGKAP JABATAN KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Pengungkapan transparansi rangkap jabatan anggota Komite Manajemen Risiko yang berasal dari Direksi dapat dilihat pada Bab Tata Kelola Perusahaan di bagian rangkap jabatan dalam Laporan Tahunan ini.

MASA JABATAN DAN PERIODE JABATAN KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Masa jabatan dan periode jabatan Komite Manajemen Risiko baik yang berasal dari Direksi maupun SEVP Perseroan mengikuti masa jabatan Direksi dan Kepala Divisi Perseroan yang menjadi anggota komite tersebut.

PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Pelatihan anggota Komite Manajemen Risiko yang berasal dari Direksi dapat dilihat pada Sub Bab Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Anggota Direksi dalam Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

RAPAT DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE MANAJEMEN RISIKO TAHUN 2023

Kebijakan rapat Komite Manajemen Risiko diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan Komite Manajemen Risiko. Berdasarkan Kebijakan tersebut pelaksanaan rapat Komite Manajemen Risiko dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Selama

Tahun 2023, Komite Manajemen Risiko telah melakukan rapat sebanyak 16 (enam belas) kali. Adapun tanggal pelaksanaan dan agenda rapat adalah sebagai berikut.

No	Tanggal Pelaksanaan	Agenda
1	17 Januari 2023	Pembahasan Hasil <i>Self-Assessment</i> Laporan Profil Risiko Konvensional dan UUS Triwulan IV/2022 serta Tingkat Kesehatan Bank Semester II /2022
2	31 Januari 2023	Pembahasan mengenai hasil Laporan <i>Risk Maturity Index</i> Bank BTN
3	04 April 2023	Pembahasan Mengenai Hasil <i>Stress Test Internal</i>
4	18 April 2023	Pembahasan Mengenai Hasil <i>Self-Assessment</i> Laporan Profil Risiko Konvensional dan UUS Triwulan I/2023
5	29 Mei 2023	Pembahasan Mengenai Progress Pengembangan <i>Credit Scoring Model</i> (CSM) Segmen SME
6	04 Juli 2023	Persetujuan Review Limit Profil Risiko dan Review Risk Tolerance AL/DPK
7	18 Juli 2023	Pembahasan Mengenai Hasil <i>Self-Assessment</i> Laporan Profil Risiko Bankwide dan Syariah Triwulan II/2023 serta Tingkat Kesehatan Bank Semester I/2023
8	01 Agustus 2023	Pembahasan terkait Portfolio Guideline
9	09 Agustus 2023	Usulan Pencabutan Peraturan
10	12 September 2023	- Usulan Kebijakan Khusus Kerja Sama Dengan Mitra. - Usulan Peningkatan Kebijakan Khusus Komite Direksi. - Usulan Kebijakan Khusus Pengelolaan Layanan Umum.
11	26 September 2023	Penyampaian Hasil Penyusunan <i>Framework, Strategi dan Roadmap ESG</i> Bank BTN dengan pendampingan oleh KPMG
12	17 Oktober 2023	Hasil <i>Self Assesment</i> Profil Risiko Bankwide.
13	24 Oktober 2023	<i>Risk Appetite, Risk Tolerance 2024</i> dan <i>Risk Appetite Statement</i>
14	24 November 2023	Penyampaian usulan Peningkatan Dokumen <i>Recovery Plan</i> tahun 2024
15	22 Desember 2023	Perampingan Peraturan Internal Bank
16	28 Desember 2023	Penyampaian Usulan Pembentukan dan <i>Operating Model Operational Risk Control (ORC)</i>

Komite Aset dan Liabilitas

Komite Aset dan Liabilitas/*Asset and Liability Committee* atau yang selanjutnya disebut ALCO dibentuk oleh Direksi dengan tujuan untuk membantu Direksi dalam rangka merumuskan kebijakan, menyusun dan menetapkan strategi pengelolaan risiko pasar serta sarana dalam melakukan monitoring dan pengambilan keputusan terkait pelaksanaan *Asset Liability Management* (ALM) Perseroan untuk memaksimalkan profitabilitas dan menjaga struktur neraca Perseroan.

PEDOMAN KERJA KOMITE ASET DAN LIABILITAS

Pedoman kerja ALCO mengacu pada Kebijakan Khusus No. KK.9-D tentang Prosedur Tata Kelola Komite Direksi. Kebijakan Khusus tersebut antara lain mengatur terkait hal - hal yang menjadi pedoman bagi jajaran Bank dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Komite Direksi dan pelaksanaan Rapat Komite Direksi, yang salah satunya adalah Komite Aset dan Liabilitas (ALCO), meliputi:

1. Klasifikasi jenis-jenis Komite Direksi,
2. Fungsi, tugas dan tanggung jawab Komite Direksi.
3. Keanggotaan Komite Direksi.
4. Tata Cara Penyelenggaraan Rapat Komite Direksi.
5. Mekanisme Pelaporan Keputusan Signifikan Kepada Direksi.
6. Hal-hal lain terkait dengan Komite Direksi.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE ASET DAN LIABILITAS

Tanggung Jawab

1. Komite Aset dan Liabilitas bertanggung jawab mengevaluasi, mengembangkan dan menetapkan strategi pengelolaan likuiditas, sehingga Perseroan dapat memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Perseroan.
2. Komite Aset dan Liabilitas bertanggung jawab menetapkan dan mengevaluasi posisi aktiva dan pasiva Perseroan sesuai dengan tujuan pengelolaan risiko likuiditas, risiko suku bunga, dan risiko nilai tukar.
3. Komite Aset dan Liabilitas bertanggung jawab menetapkan dan mengevaluasi penetapan harga aktiva dan pasiva Perseroan, untuk memastikan harga tersebut dapat mengoptimalkan hasil penanaman dana, meminimumkan biaya dana, dan memelihara struktur neraca Perseroan sesuai dengan strategi ALMA Perseroan.
4. Komite Aset dan Liabilitas bertanggung jawab menetapkan dan mengevaluasi atas pelaksanaan dan hasil-hasil yang berkaitan dengan pengelolaan aktiva dan pasiva Perseroan yang sekurangnya meliputi: pengelolaan likuiditas; pengelolaan *gap* (*risiko maturity* dan *repricing*); pengelolaan valuta asing; pengelolaan pendapatan dan investasi.

5. Komite Aset dan Liabilitas bertanggung jawab mengevaluasi, mengembangkan dan menetapkan strategi pengelolaan ALMA Bank setiap 6 (enam) Bulan Sekali.

Tugas

1. Tugas dan fungsi Komite Aset dan Liabilitas meliputi sebagai berikut:
 - a. Mengelola strategi pengelolaan likuiditas, strategi pengelolaan risiko pasar, strategi pengelolaan risiko kredit, dan strategi pengelolaan aset dan liabilitas Perseroan dalam rangka memenuhi kebutuhan likuiditas Perseroan.
 - b. Meminimalist *idle funds*.
 - c. Memaksimalkan profitabilitas Perseroan serta menjaga struktur neraca Perseroan.
2. Tugas dan fungsi Komite Aset dan Liabilitas terkait Rapat Komite Aset dan Liabilitas atau Rapat ALCO meliputi sebagai berikut:
 - a. Memutuskan semua masalah yang dibahas dalam agenda Rapat Komite Aset dan Liabilitas sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.
 - b. Meminta Satuan Kerja terkait guna melaksanakan dan menindaklanjuti hasil Rapat Komite Aset dan Liabilitas.
 - c. Meminta Satuan Kerja yang terkait guna melaporkan pelaksanaan hasil keputusan Rapat Komite Aset dan Liabilitas secara periodik yang pelaksanaannya dilakukan oleh Satuan Kerja yang membidangi Kepatuhan.
3. Tugas dan fungsi Komite Aset dan Liabilitas juga dapat memutuskan Bank berada dalam kondisi krisis likuiditas sesuai dengan ketentuan *Contingency Funding Plan* (CFP).
 - a. Menyatakan Bank sedang berada dalam kondisi krisis likuiditas berdasarkan Rekomendasi *Liquidity Crisis Management Committee* (LCMC) dan menyatakan apabila krisis likuiditas telah berhasil diatasi.
 - b. Mengaktifkan *Contingency Funding Plan* (CFP) pada saat terjadi kondisi krisis likuiditas dan menonaktifkan kembali pada saat krisis likuiditas selesai diatasi.
 - c. mengaktifkan *Contingency Funding Plan Command Center* (CFPCC) pada saat terjadi kondisi krisis likuiditas dan menonaktifkan kembali pada saat krisis likuiditas selesai diatasi.

STRUKTUR KEANGGOTAAN KOMITE ASET DAN LIABILITAS

Struktur	Jabatan	Hak Suara	Keterangan
Ketua	Direktur Utama	√	Anggota Tetap
Direksi / SEVP	Wakil Direktur Utama *)	√	Anggota Tetap
	Direktur yang membawahi Keuangan	√	Anggota Tetap
	Direktur yang membawahi Aset Manajemen	√	Anggota Tetap
	Direktur yang membawahi Manajemen Risiko	√	Anggota Tetap
	Direktur yang membawahi Kredit dan Pembiayaan	√	Anggota Tetap
	Direktur yang membawahi Dana dan Jaringan	√	Anggota Tetap
	Direktur yang membawahi Institutional Banking	√	Anggota Tetap
	Direktur yang membawahi Teknologi Informasi	√	Anggota Tetap
	Direktur yang membawahi Human Capital, Kepatuhan, dan Hukum**	X	Anggota Tetap
SEVP	SEVP yang membawahi Wholesale Banking	√	Anggota Tetap
	SEVP yang membawahi Compliance dan Legal	X	Anggota Tidak Tetap
	SEVP yang membawahi Operasional	√	Anggota Tidak Tetap

*Ketua Pengganti 1

**Dalam hal Direktur yang membawahi Human Capital, Kepatuhan dan Hukum berhalangan, maka dapat digantikan oleh SEVP yang membawahi Compliance dan Legal

PROFIL ANGGOTA KOMITE ASET DAN LIABILITAS

Profil anggota ALCO yang berasal dari Direksi dan SEVP Perseroan dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan di bagian Profil Direksi dan Profil Pejabat Satu Level di Bawah Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

INDEPENDENSI KOMITE ASET DAN LIABILITAS

Seluruh anggota ALCO tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Perseroan, yang dapat mempengaruhi kemampuan bertindak independen.

TRANSPARANSI RANGKAP JABATAN KOMITE ASET DAN LIABILITAS

Pengungkapan transparansi rangkap jabatan anggota ALCO yang berasal dari Direksi dapat dilihat pada Bab Tata Kelola Perusahaan di bagian rangkap jabatan dalam Laporan Tahunan ini.

MASA JABATAN DAN PERIODE JABATAN KOMITE ASET DAN LIABILITAS

Masa jabatan dan periode jabatan ALCO baik yang berasal dari Direksi maupun SEVP Perseroan mengikuti masa jabatan Direksi dan Kepala Divisi Perseroan yang menjadi anggota komite tersebut.

No	Tanggal	Agenda
1.	3 Januari 2023	- Pemberian talangan penyaluran KPR Sejahtera FLPP 2023
2.	25 Januari 2023	- Evaluasi <i>Special Rate</i> Deposito Kewenangan Direksi - Usulan <i>Counter Rate</i> e'Deposito Ritel - Usulan Penambahan Kuota Tabungan Investa dan Investa Plus - Evaluasi Kebijakan Suku Bunga SKBDN dan SCF - Usulan Kebijakan Penurunan Suku Bunga Khusus Debitur yang Memenuhi KMK Platinum - Usulan Suku Bunga Promo HUT BTN ke-73 - Usulan Perpanjangan Promo KP Ruko
3.	28 Februari 2023	- Usulan Nisbah Program Berkah Tabungan, Nisbah <i>Counter Giro</i> Prima BTN iB, dan Kewenangan Memutus Nisbah Program Giro PPO - Usulan penyesuaian margin KPR HITS BTN iB for <i>Millenial</i> - Permohonan Perpanjangan Suku Bunga Kredit SME Khusus Mitra BPJS Kesehatan, SPBU Pertamina dan Mitra Perguruan Tinggi Negeri (PTN) - Usulan Suku Bunga KPR/KPA Non Subsidi - Suku Bunga untuk Pembiayaan Kendaraan Listrik - Pengukuhan Pemberian Talangan Penyaluran KPR Sejahtera FLPP 2023 - Usulan Nisbah Program Berkah Tabungan, Nisbah <i>Counter Giro</i> Prima BTN iB, dan Kewenangan Memutus Nisbah Program Giro PPO
4.	13 Maret 2023	- Evaluasi <i>Special Rate</i> Deposito USD dan IDR - Usulan Suku Bunga Kredit Konsumer Non Subsidi
5.	11 April 2023	- Evaluasi Kebijakan <i>Special Rate</i> Deposito Rupiah - Evaluasi Pengelolaan <i>Secondary Reserve</i> - Evaluasi Kewenangan <i>Special Rate</i> Kredit
6.	16 Mei 2023	- Evaluasi Kebijakan <i>Special Rate</i> deposito Valas - Permohonan Suku Bunga Kredit Konsumer Non subsidi
7.	20 Juni 2023	- <i>Counter Rate</i> E-Deposito Ritel - Proyeksi Cash Flow Bulan Juni 2023 - Permohonan Suku Bunga Kredit Konsumer Non Subsidi - Negosiasi Skema KPR Tapera

PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Pelatihan anggota ALCO yang berasal dari Direksi dapat dilihat pada Sub Bab Pelatihan dan/Atau Peningkatan Kompetensi Anggota Direksi dalam Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

RAPAT DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE ASET DAN LIABILITAS TAHUN 2023

Kebijakan rapat ALCO diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan ALCO. Berdasarkan Kebijakan tersebut pelaksanaan rapat ALCO diselenggarakan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan, tetapi jika dipandang perlu, Ketua Komite dapat menyelenggarakan rapat sewaktu-waktu. Selama tahun 2023, ALCO telah melakukan rapat sebanyak 13 (tiga belas) kali. Adapun tanggal pelaksanaan dan agenda rapat adalah sebagai berikut.

No	Tanggal	Agenda
8.	11 Juli 2023	- Pengukuhan Kebijakan <i>Special Rate</i> DPK Bulan Juli 2023 - Evaluasi Kebijakan <i>Special Rate</i> Deposito Rupiah - Penyesuaian Nisbah <i>Counter Giro</i> Prima BTN iB - Usulan Suku Bunga KPR Subsidi Khusus ASN IKN
9.	09 Agustus 2023	- Usulan <i>Counter Rate</i> Deposito dan Tabungan Felas - Evaluasi Kebijakan <i>Special Rate</i> Deposito Rupiah dan Valas - Usulan <i>Special Rate</i> Tabungan Investa Plus - Usulan <i>Special</i> Nisbah Program Berkah Tabungan - Permohonan Suku Bunga Kredit Konsumer Non Subsidi - Permohonan Suku Bunga Khusus Pembelian Aset Pasif dan NPL
10.	12 September 2023	- Pengukuhan Kebijakan <i>Special Rate</i> Tabungan Investa Plus dan Deposito IDR September 2023 - Usulan Perubahan <i>Counter Rate</i> e'Deposito Ritel IDR - Evaluasi Kebijakan <i>Special Rate</i> Deposito IDR - Evaluasi dan Perpanjangan Suku Bunga KPR Promo
11.	10 Oktober 2023	- Usulan Suku Bunga DPK Valas - Evaluasi Kebijakan <i>Special Rate</i> DPK Rupiah - Evaluasi Suku Bunga KAR <i>Project Eagle</i> - Evaluasi Suku Bunga Kredit Segmen Komersial dan Korporasi - Evaluasi Suku Bunga KAR <i>Project Eagle</i>
12.	14 November 2023	- Evaluasi Kebijakan <i>Special Rate</i> Deposito Rupiah
13.	12 Desember 2023	- Evaluasi Kebijakan <i>Special Rate</i> Deposito Rupiah - Evaluasi Suku Bunga Kredit/Pembiayaan KP Ruko <i>Counter</i> dan Promo - Pengukuhan dan Perpanjangan Suku Bunga Kring BTN Super Solusi - Permohonan Suku Bunga KPR BTN Mikro

Komite Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan

Komite Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan merupakan komite yang berperan dalam merumuskan kebijakan, mengawasi pelaksanaan kebijakan, memantau perkembangan dan kondisi portofolio perkreditan serta memberikan arahan untuk langkah-langkah perbaikan di bidang perkreditan.

PEDOMAN KERJA KOMITE KEBIJAKAN PERKREDITAN ATAU PEMBIAYAAN

Struktur dan keanggotaan Komite Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan mengacu pada Kebijakan Khusus No. KK.9-D tanggal 27 Maret 2023 tentang Prosedur Tata Kelola Komite Direksi, dengan struktur dan keanggotaan sebagai berikut:

1. Tugas, Fungsi dan Tanggung Jawab Komite.
2. Mekanisme dan Tata Cara Penyelenggaraan Rapat Komite.
3. Risalah Rapat dan Tindak Lanjut Risalah Rapat Komite.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE KEBIJAKAN PERKREDITAN ATAU PEMBIAYAAN

Tugas dan tanggung jawab Komite Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan adalah membantu Direktur Utama atas hal-hal yang berkaitan dengan, antara lain dan sekurang-kurangnya meliputi:

1. Memberikan masukan kepada Direksi dalam rangka penyusunan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank (KPB) terutama yang berkaitan dengan perumusan prinsip kehati-hatian dalam perkreditan atau pembiayaan.
2. Mengawasi agar KPB dapat diterapkan dan dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten serta merumuskan pemecahan apabila terdapat hambatan/kendala dalam penerapan KPB. Selanjutnya Komite Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan juga melakukan kajian berkala terhadap KPB dan memberikan saran kepada Direksi apabila diperlukan perubahan/perbaikan KPB.
3. Memantau dan mengevaluasi:
 - a. Perkembangan dan kualitas portofolio perkreditan atau pembiayaan secara keseluruhan.
 - b. Kebenaran pelaksanaan kewenangan memutus kredit atau pembiayaan.
 - c. Kebenaran proses pemberian, perkembangan dan kualitas kredit atau pembiayaan yang diberikan kepada pihak yang terkait dengan Perseroan dan debitur-debitur besar tertentu.
 - d. Kebenaran pelaksanaan ketentuan BMPK.
 - e. Ketaatan terhadap ketentuan perundang-undangan dan peraturan lainnya dalam pelaksanaan pemberian kredit atau pembiayaan.
 - f. Penyelesaian kredit bermasalah sesuai dengan yang ditetapkan dalam KPB.
 - g. Upaya Perseroan dalam memenuhi kecukupan jumlah penyalangan penghapusan kredit atau pembiayaan.
4. Menyampaikan laporan tertulis secara berkala kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a. Hasil pengawasan atas penerapan dan pelaksanaan KPB.
 - b. Hasil pemantauan dan evaluasi mengenai hal-hal yang dimaksud dalam fungsi Komite Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan.
5. Memberikan saran langkah-langkah perbaikan kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris mengenai hal-hal yang terkait dengan tanggung jawab nomor 1.
6. Dalam hal terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan KPB yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah maka laporan disampaikan pula kepada Dewan Pengawas Syariah.

STRUKTUR KEANGGOTAAN KOMITE KEBIJAKAN PERKREDITAN ATAU PEMBIAYAAN

Struktur dan keanggotaan Komite Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan mengacu pada Kebijakan Khusus No. KK.9-D tanggal 27 Maret 2023 tentang Prosedur Tata Kelola Komite Direksi, dengan struktur dan keanggotaan sebagai berikut:

Struktur	Jabatan	Hak Suara	Keterangan
Ketua	Direktur Utama	√	Anggota Tetap
Direksi/ SEVP	Wakil Direktur Utama *)	√	Anggota Tetap
	Direktur yang membawahi Manajemen Risiko**)	√	Anggota Tetap
	Direktur yang membawahi Aset Manajemen	√	Anggota Tetap
	Direktur yang membawahi Kredit dan Pembiayaan	√	Anggota Tetap
	Direktur yang membawahi Dana dan Jaringan	√	Anggota Tetap
	Direktur yang membawahi Institutional Banking	√	Anggota Tetap
	Direktur yang membawahi Keuangan	√	Anggota Tetap
	Direktur yang membawahi Human Capital, Kepatuhan dan Hukum	X	Anggota Tetap
	SEVP yang membawahi Wholesale Banking	√	Anggota Tetap
	Direktur yang membawahi Teknologi Informasi	√	Anggota Tidak Tetap
	SEVP yang membawahi Operasional	√	Anggota Tidak Tetap
	SEVP yang membawahi Compliance dan Legal	X	Anggota Tidak Tetap

*) Ketua Pengganti I
 **) Ketua Pengganti II

PROFIL ANGGOTA KOMITE KEBIJAKAN PERKREDITAN ATAU PEMBIAYAAN

Profil anggota Komite Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan baik yang berasal dari Direksi dan SEVP Perseroan dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan di bagian Profil Direksi dan Profil Pejabat Satu Level di Bawah Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

INDEPENDENSI KOMITE KEBIJAKAN PERKREDITAN ATAU PEMBIAYAAN

Seluruh anggota Komite Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Perseroan, yang dapat mempengaruhi kemampuan bertindak independen.

TRANSPARANSI RANGKAP JABATAN KOMITE KEBIJAKAN PERKREDITAN ATAU PEMBIAYAAN

Pengungkapan transparansi rangkap jabatan anggota Komite Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan yang berasal dari Direksi dapat dilihat pada Bab Tata Kelola Perusahaan di bagian rangkap jabatan dalam Laporan Tahunan ini.

MASA JABATAN DAN PERIODE JABATAN KOMITE KEBIJAKAN PERKREDITAN ATAU PEMBIAYAAN

Masa jabatan dan periode jabatan Komite Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan baik yang berasal dari Direksi maupun SEVP Perseroan mengikuti masa jabatan Direksi dan Kepala Divisi Perseroan yang menjadi anggota komite tersebut.

PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI ATAU PEMBIAYAAN

Pelatihan anggota Komite Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan yang berasal dari Direksi dapat dilihat pada Sub Bab Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Anggota Direksi dalam Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

RAPAT DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE KEBIJAKAN PERKREDITAN ATAU PEMBIAYAAN TAHUN 2023

Rapat Komite Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Selama Tahun 2023, Komite Kebijakan Perkreditan telah melakukan rapat sebanyak 9 (sembilan) kali. Adapun tanggal pelaksanaan dan agenda rapat adalah sebagai berikut.

No.	Tanggal	Agenda
1.	14 Februari 2023	Usulan Peraturan Kebijakan Khusus tentang Kredit Lunak Karyawan
2.	7 Maret 2023	Usulan Kebijakan Khusus tentang Pengelolaan Dokumen Kredit
3.	30 Mei 2023	Usulan Persetujuan Kebijakan Khusus tentang Manajemen Penagihan dan Penyelesaian Kredit untuk Segmen Konsumer

No.	Tanggal	Agenda
4.	19 September 2023	Usulan Kebijakan Khusus tentang Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit Komersial
5.	16 Oktober 2023	Review Kebijakan Khusus KK.1-G tentang Produk dan Layanan Kredit Korporasi (<i>Corporate Loan</i>)
6.	20 Oktober 2023	Usulan Kebijakan Khusus tentang KMK & KMK Renovasi Untuk Percepatan Penyelesaian Aset Kredit Bermasalah
7.	27 Oktober 2023	Penyesuaian Struktur KMK Kontruksi (KYG) dan KPL
8.	6 November 2023	Usulan Persetujuan atas Permohonan Kebijakan Recovery dan Penyelamatan Kredit Pasif
9.	21 Desember 2023	Tindak Lanjut Temuan Audit OJK pada PKPB Tahun 2021 dan Delegasi Kewenangan dan Proyek Tiger

Komite Kredit

Komite Kredit merupakan Komite yang berperan dalam memberikan keputusan pemberian kredit (kredit baru, perubahan fasilitas kredit, maupun restrukturisasi kredit) sesuai kewenangan tertinggi berdasarkan Batas Wewenang Memutus Kredit (BWMK).

PEDOMAN KERJA KOMITE KREDIT

Pedoman kerja Komite Kredit mengacu pada Kebijakan Khusus No. KK.9-D tanggal 27 Maret 2023 tentang Prosedur Tata Kelola Komite Direksi dan Kebijakan Khusus Nomor KK.1-Q tanggal 29 September 2023 tentang Batas Wewenang Memutus Kredit atau Pembiayaan Komersial dengan isi muatan sebagai berikut:

- Tugas, Fungsi, dan Tanggung Jawab Komite Kredit
- Tata Cara Penyelenggaraan Komite Kredit
- Struktur dan Keanggotaan Komite Kredit
- Tugas Sekretaris dan Anggota Komite Kredit
- Batas Wewenang Memutus Kredit

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE KREDIT

Tugas dan tanggung jawab Komite Kredit adalah memberikan rekomendasi dan memutus pemberian kredit (kredit baru maupun restrukturisasi kredit) untuk segmen kredit komersial maupun kredit konsumen sesuai kewenangan tertinggi berdasarkan Batas Wewenang Memutus Kredit (BWMK).

STRUKTUR KEANGGOTAAN KOMITE KREDIT

No	Jenis Komite	Tingkat Komite	Unit Kerja
1	Komite A	A1	Direksi
		A2	
		A3	
		A4	
2	Komite B	B	Kantor Pusat

No	Jenis Komite	Tingkat Komite	Unit Kerja
3.	Komite C	C1	Kantor Wilayah
		C2	Commercial Banking Center (CBC)
4.	Komite D	D1	Kantor Cabang/Kantor Cabang Syariah
		D2	
		D3	

*Jika sebagai pengusul kredit maka berubah menjadi fungsi bisnis.

2. Komite Kredit pada tingkat Direksi terbagi menjadi 4 (empat) tingkat dengan jumlah kuorum minimal kehadiran Anggota Tetap sebagai berikut:

Komite	Fungsi Bisnis	Fungsi Risk	Fungsi Independen
Komite A1	Seluruh Anggota	Seluruh Anggota	1 orang
Komite A2	3 orang	3 orang	1 orang
Komite A3	2 orang	2 orang	1 orang
Komite A4	1 orang	1 orang	1 orang

3. Keanggotaan Tetap pada Komite Kredit pada tingkat Direksi terbagi menjadi 3 (tiga) fungsi dan *voting rights* yang melekat pada fungsi masing-masing sebagai berikut:

Fungsi Risiko		Fungsi Bisnis	
Jabatan	Voting Rights	Jabatan	Voting Rights
Direktur Utama	√	Wakil Direktur Utama	√
Direktur yang membawahi Manajemen Risiko	√	Direktur yang membawahi Perkreditan/ Pembiayaan	√
Direktur yang membawahi Asset Management	√	Direktur yang membawahi Keuangan	√
Direktur yang membawahi Sistem Informasi	√	Direktur yang membawahi Jaringan	√
SEVP yang membawahi Operasional Kredit	√	Direktur yang membawahi Institutional Banking	√
		SEVP yang membawahi Wholesale Banking	√
Fungsi Independen			Voting Rights
Direktur yang membawahi Kepatuhan dan Legal			X
SEVP yang membawahi Kepatuhan dan Legal			X

Keanggotaan Tidak Tetap pada Komite Kredit tingkat Direksi diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Jabatan	Voting Rights
1	Kepala/Wakil Kepala Satuan Kerja Kredit Komersial atau Pejabat Pemegang Kewenangan RKK	X
2	Kepala Satuan Kerja Kredit Korporasi atau Pejabat Pemegang Kewenangan RKK	X
3	Kepala Satuan Kerja Kredit SME atau Pejabat Pemegang Kewenangan RKK	X
4	Kepala Satuan Kerja Pembiayaan Komersial atau Pejabat Pemegang Kewenangan RKK	X
5	Kepala Satuan Kerja Asset Management atau Pejabat Pemegang Kewenangan RKK	X
6	Kepala Satuan Kerja Financial Institution atau Pejabat Pemegang Kewenangan RKK	X
7	Kepala/Wakil Kepala Satuan Kerja Risiko Kredit Komersial atau Pejabat Pemegang Kewenangan RKK	X
8	Kepala Unit Kerja Kredit Komersial pada Commercial Banking Center	X
9	Kepala Unit Kerja Risiko Kredit Komersial pada Commercial Banking Center	X
10	Kepala Satuan Kerja Legal atau Pejabat Pemegang Kewenangan RKK	X
11	Kepala Satuan Kerja Kepatuhan atau Pejabat Pemegang Kewenangan RKK	X
12	Kepala Satuan Kerja Audit Internal atau Pejabat Pemegang Kewenangan RKK	X

4. Keanggotaan pada Komite Kredit selain pada tingkat Direksi diatur dengan ketentuan sesuai tingkat masing-masing sebagai berikut:

A. Komite Kredit B

- Anggota Tetap

Fungsi Risiko		Fungsi Bisnis	
Jabatan	Voting Rights	Jabatan	Voting Rights
Kepala/Wakil Kepala Satuan Kerja Risiko Kredit Komersial atau Pejabat Pemegang Kewenangan RKK	√	Kepala/Wakil Kepala Satuan Kerja Kredit Komersial atau Pejabat Pemegang Kewenangan RKK	√
		Kepala Satuan Kerja Kredit Korporasi atau Pejabat Pemegang Kewenangan RKK	√

Fungsi Risiko		Fungsi Bisnis	
Jabatan	Voting Rights	Jabatan	Voting Rights
		Kepala Satuan Kerja Kredit SME atau Pejabat Pemegang Kewenangan RKK;	√
		Kepala Satuan Kerja Pembiayaan Komersial atau Pemegang Kewenangan RKK	√
		Kepala Satuan Kerja <i>Asset Management</i> atau Pejabat Pemegang Kewenangan RKK	√
		Kepala Satuan Kerja <i>Financial Institution</i> atau Pejabat Pemegang Kewenangan RKK	√

• Anggota Tidak Tetap

No	Anggota Tidak Tetap	Voting Rights
1	Kepala Departemen Satuan Kerja Kredit Komersial	X
2	Kepala Departemen Satuan Kerja Kredit Korporasi	X
3	Kepala Departemen Satuan Kerja Kredit SME	X
4	Kepala Departemen Satuan Kerja Pembiayaan Komersial	X
5	Kepala Departemen Satuan Kerja Financial Institution	X
6	Kepala Departemen Satuan Kerja Asset Management	X
7	Kepala Unit Kerja Kredit Komersial pada Commercial Banking Center	X
8	Kepala Departemen Satuan Kerja Risiko Kredit Komersial	X
9	Kepala Unit Kerja Risiko Kredit Komersial pada Commercial Banking Center	X
10	Kepala Departemen Satuan Kerja Legal atau Pejabat Pemegang Kewenangan	X
11	Kepala Departemen Satuan Kerja Kepatuhan atau Pejabat Pemegang Kewenangan	X

B. Komite Kredit C1

• Anggota Tetap

Fungsi Risiko		Fungsi Bisnis	
Jabatan	Voting Rights	Jabatan	Voting Rights
Kepala Unit Kerja Risiko Kredit Komersial di Kantor Wilayah	√	Kepala Kantor Wilayah	√
		Kepala Satuan Kerja Asset Management di Kantor Wilayah	√

• Anggota Tidak Tetap

No	Anggota Tidak Tetap	Voting Rights
1	Wakil Kepala Kantor Wilayah	X
2	Kepala Unit Kerja Kredit SME pada Kantor Wilayah	X
3	Kepala Unit Kerja Kredit Komersial pada Commercial Banking Center	X
4	Kepala Unit Kerja Risiko Kredit Komersial pada Commercial Banking Center	X
5	Analisis Risiko Kredit Komersial pada Kantor Wilayah	X
6	Legal Checklist	X
7	Compliance Checklist	X

C. Komite Kredit C2

• Anggota Tetap

Fungsi Risiko		Fungsi Bisnis	
Jabatan	Voting Rights	Jabatan	Voting Rights
Kepala Unit Kerja Kredit Komersial pada Commercial Banking Center	√	Kepala Unit Kerja Risiko Kredit Komersial pada Commercial Banking Center	√

• Anggota Tidak Tetap

No	Anggota Tidak Tetap	Voting Rights
1	Manajer Unit Kerja Kredit Komersial pada Commercial Banking Center	X
2	Manajer Unit Kerja Risiko Kredit Komersial pada Commercial Banking Center	X
3	Legal Checklist	X
4	Compliance Checklist	X

D. Komite Kredit D

- Anggota Tetap

Fungsi Risiko		Fungsi Bisnis	
Jabatan	Voting Rights	Jabatan	Voting Rights
Kepala Unit Kerja Risiko Kredit SME/ Pembiayaan di Kantor Cabang/ Kantor Cabang Syariah	√	Kepala Cabang atau Kepala Cabang Syariah	√

- Anggota Tidak Tetap

No	Anggota Tidak Tetap	Voting Rights
1	Kepala Unit Kerja Kredit SME di Kantor Cabang	X
2	Kepala Unit Kerja Pembiayaan Komersial di Kantor Cabang Syariah	X
3	Analisis Risiko Kredit SME/Pembiayaan di Kantor Cabang/Kantor Cabang Syariah	X
4	Legal Checklist	X
5	Compliance Checklist	X

PROFIL ANGGOTA KOMITE KREDIT

Profil anggota Komite Kredit baik yang berasal dari Direksi dan SEVP Perseroan dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan di bagian Profil Direksi dan Profil Pejabat Satu Level di Bawah Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

INDEPENDENSI KOMITE KREDIT

Seluruh anggota Komite Kredit tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Perseroan, yang dapat mempengaruhi kemampuan bertindak independen.

TRANSPARANSI RANGKAP JABATAN KOMITE KREDIT

Pengungkapan transparansi rangkap jabatan anggota Komite Kredit yang berasal dari Direksi dapat dilihat pada Bab Tata Kelola Perusahaan di bagian rangkap jabatan dalam Laporan Tahunan ini.

MASA JABATAN DAN PERIODE JABATAN KOMITE KREDIT

Masa jabatan dan periode jabatan Komite Kredit baik yang berasal dari Direksi maupun SEVP Perseroan mengikuti masa jabatan Direksi dan Kepala Divisi Perseroan yang menjadi anggota komite tersebut.

PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Pelatihan anggota Komite Kredit yang berasal dari Direksi dapat dilihat pada Sub Bab Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Anggota Direksi dalam Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

RAPAT DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE KREDIT TAHUN 2023

Pelaksanaan Rapat Komite Kredit dilakukan dalam rangka pengambilan keputusan kredit komersial, baik permohonan baru, perubahan struktur kredit, maupun restrukturisasi kredit. Penyelenggaraan Komite Kredit diusulkan oleh Divisi Pengusul, dalam hal ini Divisi Bisnis Kredit Komersial dan Divisi Risiko Kredit Komersial. Dalam Tahun 2023, Komite Kredit telah melakukan rapat sebanyak 3.047 kali rapat pada berbagai tingkat, dengan rincian sebagai berikut.

No	Tingkat RKK	Jumlah Pelaksanaan
1	Komite Kredit A	240
2	Komite Kredit B	166
3	Komite Kredit C1	168
4	Komite Kredit C2	685
5	Komite Kredit D	1.788

Komite Human Capital

Direksi telah membentuk Komite *Human Capital* dalam rangka membantu Dewan Komisaris dalam perumusan kebijakan, mengawasi pelaksanaan kebijakan, memantau perkembangan dan kondisi Ketenagakerjaan serta memberikan saran langkah perbaikan yang sesuai dengan peraturan Ketenagakerjaan Perseroan dan Undang-undang Ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia.

PEDOMAN KERJA KOMITE HUMAN CAPITAL

Pedoman kerja Komite *Human Capital* mengacu pada Kebijakan Khusus KK.9 – D Tanggal 27 Maret 2023 Tentang Prosedur Tata Kelola Komite Direksi.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE HUMAN CAPITAL

Tugas dan tanggung jawab Komite *Human Capital* adalah membantu Direktur Utama atas hal-hal yang berkaitan dengan, antara lain dan sekurang-kurangnya meliputi:

1. Merekomendasikan strategi, kebijakan dan sistem pengelolaan *human capital* yang searah dengan Rencana Bisnis Bank.
2. Berwenang memutus terkait implementasi pengelolaan di bidang personalia.
3. Bertanggung jawab atas rekomendasi usulan kebijakan yang selanjutnya akan diputus melalui mekanisme Rapat Direksi.
4. Memutus usulan kebijakan, standar, dan prosedur Bank yang terkait *human capital*.
5. Berwenang memutus di luar butir 1 – 4 tersebut diatas apabila diberikan mandat oleh Rapat Direksi.

6. Apabila diperlukan dapat berkoordinasi dengan Komite Remunerasi dan Nominasi dalam review sistem/kebijakan Human Capital Management.
7. *Human Capital Committee* Pusat bertanggungjawab menyampaikan laporan atas keputusan signifikan baik yang merupakan keputusan *Human Capital Committee* Pusat maupun keputusan *Human Capital Committee* Satuan Kerja di Kantor Pusat/Kantor Wilayah/Kantor Cabang/Tim yang dibuat kepada Rapat Direksi minimal 1 (satu) tahun sekali.

STRUKTUR KEANGGOTAAN KOMITE HUMAN CAPITAL

Struktur dan Keanggotaan Komite Human Capital telah ditetapkan berdasarkan Kebijakan Khusus KK.9 – D Tanggal 27 Maret 2023 Tentang Prosedur Tata Kelola Komite Direksi dengan struktur dan keanggotaan sebagai berikut:

Struktur	Jabatan	Hak Suara	Keterangan
Ketua (Merangkap Anggota Tetap)	Direktur Utama	√	Anggota Tetap
Direksi / SEVP	Wakil Direktur Utama *)	√	Anggota Tetap
	Direktur yang membawahi Human Capital, Kepatuhan, dan Hukum	√	Anggota Tetap
	Direktur yang membawahi Dana dan Jaringan	√	Anggota Tetap
	Direktur yang membawahi Manajemen Risiko	√	Anggota Tetap
	Direktur yang membawahi Kredit dan Pembiayaan	√	Anggota Tetap
	Direktur yang membawahi Institutional Banking	√	Anggota Tidak Tetap
	Direktur yang membawahi Aset Manajemen	√	Anggota Tidak Tetap
	Direktur yang membawahi Teknologi Informasi	√	Anggota Tidak Tetap
	Direktur yang membawahi Keuangan	√	Anggota Tidak Tetap
	SEVP yang membawahi Wholesale Banking	√	Anggota Tidak Tetap
	SEVP yang membawahi Compliance & Legal	X	Anggota Tidak Tetap
	SEVP yang membawahi Operasional	√	Anggota Tidak Tetap

Keterangan:
*) Ketua Pengganti I

PROFIL ANGGOTA KOMITE HUMAN CAPITAL

Profil anggota Komite Human Capital baik yang berasal dari Direksi dan SEVP Perseroan dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan di bagian Profil Direksi dan Profil Pejabat Satu Level di Bawah Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

INDEPENDENSI KOMITE HUMAN CAPITAL

Seluruh anggota Komite Human Capital tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Perseroan, yang dapat mempengaruhi kemampuan bertindak independen.

TRANSPARANSI RANGKAP JABATAN KOMITE HUMAN CAPITAL

Pengungkapan transparansi rangkap jabatan anggota Komite Human Capital yang berasal dari Direksi dapat dilihat pada Bab Tata Kelola Perusahaan di bagian rangkap jabatan dalam Laporan Tahunan ini.

MASA JABATAN DAN PERIODE JABATAN KOMITE HUMAN CAPITAL

Masa jabatan dan periode jabatan Komite Human Capital baik yang berasal dari Direksi maupun SEVP Perseroan mengikuti masa jabatan Direksi dan Kepala Divisi Perseroan yang menjadi anggota komite tersebut.

PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Pelatihan anggota Komite Human Capital yang berasal dari Direksi dapat dilihat pada Sub Bab Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Anggota Direksi dalam Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

RAPAT DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE HUMAN CAPITAL TAHUN 2023

Kebijakan rapat Komite Human Capital dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Selama Tahun 2023, Komite Human Capital telah melakukan rapat sebanyak 14 (empat belas) kali. Adapun tanggal pelaksanaan dan agenda rapat adalah sebagai berikut.

No.	Tanggal	Agenda
1	24 Januari 2023	1. Rangkaian usulan mutasi terkait pemenuhan jabatan Regional Office Head pada Kantor Wilayah 2 2. Usulan Promosi/Mutasi Pejabat di Kantor Cabang 3. Penetapan Definitif Branch Manager 4. Usulan Penghapusan Status Pejabat Layer 1 (Kepala Divisi dan Branch Manager)
2	20 Februari 2023	1. Usulan penetapan <i>Selected Talent</i> BOD-1 Bank BTN Tahun 2023
3	28 Maret 2023	1. Usulan pergantian Kepengurusan Ketua Dewan Pengawas Dana Pensiun Bank BTN 2. Usulan Pergantian Kepengurusan Anggota Dewan Pengawas Yayasan Kesejahteraan Pegawai Bank BTN. 3. Usulan kandidat talent internal Bank BTN

No.	Tanggal	Agenda
4	29 Maret 2023	1. Usulan pergantian Anggota Dewan Pengawas Dana Pensiun Bank BTN. 2. Evaluasi Struktur Organisasi Tim Strategi Pengembangan Syariah (TSPS). 3. Usulan promosi/mutasi pejabat layer 1 dan 2.
5	29 Mei 2023	1. Usulan mutasi pejabat 2. Usulan Mutasi/Promosi pejabat dalam rangka evaluasi, 3. Usulan Penugasan pejabat pada perusahaan terafiliasi.
6	12 Juni 2023	Usulan pembentukan Tim <i>Taskforce Recovery</i> dan Penyelamatan Kredit
	04 Juli 2023	Usulan Promosi/Mutasi <i>Branch Manager</i> Dalam Rangka Evaluasi Kinerja
7	10 Juli 2023	Penyampaian Update Pengelolaan Talent Bank BTN
8	31 Juli 2023	1. Usulan penugasan pejabat pada perusahaan terafiliasi dan perusahaan lainnya 2. Evaluasi Pejabat (Division Head) Eligible Promosi 3. Usulan Pembagian Direktur/SEVP Pembina Wilayah
9	11 Agustus 2023	1. Usulan Penyesuaian <i>Grade Branch Manager</i> KC & KCS 2. Usulan rangkaian mutasi dalam rangka pemenuhan jabatan
	05 September 2023	Usulan promosi mutasi dalam rangka pemenuhan jabatan
10	2 Oktober 2023	1. Usulan Promosi Pejabat BOD-1 2. Usulan Penetapan Definitif Kepala Divisi 3. Usulan Pemenuhan Kepala Divisi
11	24 Oktober 2023	Usulan Pemenuhan Kepala Divisi
12	20 November 2023	Usulan Rekomposisi dan Penambahan Nominated Talent Bank BTN Tahun 2023
13	20 Desember 2023	Usulan Pemenuhan Branch Manager

Komite Pengarah Teknologi Infomasi (KPTI)

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum, Perseroan wajib memiliki Komite Pengarah Teknologi Informasi (KPTI). Untuk mendukung hal tersebut, perlu adanya ketentuan yang mengatur tentang Komite Pengarah Teknologi Informasi (KPTI). Sehubungan dengan hal tersebut, Direksi memandang perlu untuk mengatur ketentuan mengenai Komite Pengarah Teknologi Informasi (KPTI) dalam bentuk Kebijakan Khusus Nomor KK.9-D tentang Prosedur Tata Kelola Komite Direksi.

PEDOMAN KERJA KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFOMASI (KPTI)

Pedoman kerja Komite Pengarah Teknologi Informasi (KPTI) mengacu pada ketentuan internal Perseroan yaitu Kebijakan

Khusus Nomor KK.9-D tanggal 27 Maret 2023 tentang Prosedur Tata Kelola Komite Direksi.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFOMASI (KPTI)

Tugas dan fungsi Komite Pengarah Teknologi Informasi (KPTI) adalah memberikan rekomendasi kepada Direksi yang mencakup:

- Rencana Strategis Teknologi Informasi (RSTI) yang sejalan dengan rencana strategis kegiatan usaha Perseroan. Dalam memberikan rekomendasi, Komite Pengarah Teknologi Informasi (KPTI) harus memperhatikan faktor efisiensi, efektivitas, dan hal-hal sebagai berikut:
 - Peta jalan (*roadmap*) untuk mencapai kebutuhan Teknologi Informasi (TI) yang mendukung strategi bisnis Perseroan. Peta jalan (*roadmap*) terdiri dari kondisi saat ini (*current state*), kondisi yang ingin dicapai (*future state*), dan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai kondisi yang ingin dicapai;
 - Sumber daya yang dibutuhkan;
 - Manfaat yang akan diperoleh saat Rencana Strategis Teknologi Informasi (RSTI) diterapkan;
 - Kendala yang mungkin timbul dalam penerapan Rencana Strategis Teknologi Informasi (RSTI).
- Memutus usulan atas kebijakan, standar dan prosedur Perseroan yang terkait Teknologi Informasi (TI).
- Pemantauan prioritas IT CAPEX dan IT OPEX terhadap pengembangan Teknologi Informasi (TI) berdasarkan Rencana Strategis Teknologi Informasi (RSTI).
- Kewenangan untuk memutus prioritas dan realokasi terhadap IT CAPEX, IT OPEX dan IT Plan, dengan mempertimbangkan aspek-aspek sebagai berikut:
 - Kesesuaian antara rencana pengembangan Teknologi Informasi (TI) dengan Rencana Strategis Teknologi Informasi (RSTI); dan
 - Kesesuaian antara pelaksanaan pengembangan Teknologi Informasi (TI) dengan Rencana Pengembangan Teknologi Informasi (TI) yang disepakati (*portfolio list*).
- Evaluasi atas efektivitas biaya Teknologi Informasi (TI) terhadap pencapaian manfaat yang direncanakan.
- Pemantauan atas kinerja Teknologi Informasi (TI) dan upaya peningkatan kinerja Teknologi Informasi (TI).
- Upaya penyelesaian berbagai masalah terkait Teknologi Informasi (TI) yang tidak dapat diselesaikan oleh Satuan Kerja Pengguna dan Satuan Kerja Penyelenggara Teknologi Informasi (TI) secara efektif, efisien dan tepat waktu.
- Kecukupan dan alokasi sumber daya yang dimiliki Perseroan.
- Efektivitas langkah-langkah dalam meminimalisasi risiko atas investasi Perseroan pada sektor Teknologi Informasi (TI) agar investasi Perseroan pada Teknologi Informasi (TI) memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan bisnis Perseroan.
- Strategi dan langkah-langkah perbaikan atas hal-hal yang berkaitan dengan penerapan manajemen risiko terkait Teknologi Informasi (TI), *Digital* dan Siber di Perseroan.

STRUKTUR KEANGGOTAAN KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI (KPTI)

Struktur dan keanggotaan Komite Pengarah Teknologi Informasi (KPTI) mengacu pada Kebijakan Khusus No. KK.9-D tanggal 27 Maret 2023 tentang Prosedur Tata Kelola Komite Direksi, dengan struktur dan keanggotaan sebagai berikut:

Struktur	Jabatan	Hak Suara	Keterangan
Ketua	Direktur Utama	√	Anggota Tetap
Direksi	Wakil Direktur Utama*)	√	Anggota Tetap
	Direktur yang membawahi Teknologi Informasi	√	Anggota Tetap
	Direktur yang membawahi Manajemen Risiko	√	Anggota Tetap
	Direktur yang membawahi Keuangan	√	Anggota Tetap
Direksi/SEVP	Direktur/SEVP lain sesuai materi pembahasan	√	Anggota Tidak Tetap
	Direktur yang membawahi Human Capital, Kepatuhan dan Hukum	X	Anggota Tidak Tetap
	SEVP yang membawahi Compliance dan Legal	X	Anggota Tidak Tetap

*Ketua Pengganti I

PROFIL ANGGOTA KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI (KPTI)

Profil anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi (KPTI) baik yang berasal dari Direksi dan SEVP Perseroan dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan di bagian Profil Direksi dan Profil Pejabat Satu Level di Bawah Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

INDEPENDENSI KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI (KPTI)

Seluruh anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi (KPTI) tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Perseroan, yang dapat mempengaruhi kemampuan bertindak independen.

TRANSPARANSI RANGKAP JABATAN KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI (KPTI)

Pengungkapan transparansi rangkap jabatan anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi (KPTI) yang berasal dari Direksi dapat dilihat pada Bab Tata Kelola Perusahaan di bagian rangkap jabatan dalam Laporan Tahunan ini.

MASA JABATAN DAN PERIODE JABATAN KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI (KPTI)

Masa jabatan dan periode jabatan Komite Pengarah Teknologi Informasi (KPTI) baik yang berasal dari Direksi maupun SEVP Perseroan mengikuti masa jabatan Direksi dan Kepala Divisi Perseroan yang menjadi anggota komite tersebut.

PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Pelatihan anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi (KPTI) yang berasal dari Direksi dapat dilihat pada Sub Bab Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Anggota Direksi dalam Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

RAPAT DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI (KPTI) TAHUN 2023

Komite Pengarah Teknologi Informasi (KPTI) dilakukan paling kurang 4 (empat) kali selama tahun berjalan. Apabila dipandang perlu, rapat Komite Pengarah Teknologi Informasi (KPTI) dapat diadakan setiap waktu atas permohonan tertulis dari anggota tetap Komite Pengarah Teknologi Informasi (KPTI). Selama tahun 2023, Komite Pengarah Teknologi Informasi (KPTI) telah melakukan rapat sebanyak 4 (empat) kali. Adapun tanggal pelaksanaan dan agenda rapat adalah sebagai berikut.

No	Tanggal	Agenda
1	8 Maret 2023	- Review Inisiatif Teknologi Informasi (TI) dan Rencana Strategi Teknologi Informasi (RSTI) 2022 (Include Sharia). - Update Inisiatif Teknologi Informasi (TI) 2023 (Include Sharia). - IT Key Risk Indicator (KRI) Monitoring.
2	23 Mei 2023	- Review Inisiatif Teknologi Informasi (TI) dan Rencana Strategi Teknologi Informasi (RSTI) 2023 (include Sharia). - Assessment Core Banking System & Branch Delivery System. - Assessment Data Center Operation & Infrastructure Improvement. - Update IT Security & IT KRI Monitoring (lesson learned security incident).
3	31 Agustus 2023	- Review Inisiatif Teknologi Informasi (TI) dan Rencana Strategi Teknologi Informasi (RSTI) 2023. - Update Strategic Projects. - Update IT Security. - IT Key Risk Indicator (KRI) Monitoring.
4	21 November 2023	- Review Inisiatif 2023. - Inisiatif dan Usulan Anggaran 2024. - Update Data Analytics. - IT Key Risk Indicator (KRI) Monitoring.

Komite Pengarah Transformasi

Fungsi Komite Pengarah Transformasi adalah membantu Direksi dalam menentukan prioritas dan memutuskan pelaksanaan inisiatif Transformasi sesuai strategi bisnis Perseroan dalam bidang *Human Capital, Organization & Governance, Risk Management and Compliance (GRC); information Technology, Digital and Network; Commercial Banking & Business Process, Consumer Banking & Sharia; Partnership & Project Management*.

PEDOMAN KERJA KOMITE PENGARAH TRANSFORMASI

Pedoman kerja Komite Pengarah Transformasi mengacu pada Kebijakan Khusus No. KK.9-D tanggal 27 Maret 2023 tentang Prosedur Tata Kelola Komite Direksi, Pedoman tersebut antara lain mengatur antara lain:

1. Tanggung Jawab Komite Pengarah Transformasi.
2. Tugas dan Fungsi Komite Pengarah Transformasi.
3. Tugas Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komite Pengarah Transformasi.
4. Tata Cara Penyelenggaraan Rapat.
5. Risalah Rapat.
6. Tindak Lanjut Risalah Rapat.

STRUKTUR KEANGGOTAAN KOMITE PENGARAH TRANSFORMASI

Komite Pengarah Transformasi terkait dengan Human Capital Organization & GRC

Struktur	Jabatan	Hak Suara	Keterangan
Ketua	Direktur yang membawahi Transformasi dan Manajemen Risiko	√	Anggota Tetap
Direksi/SEVP	Direktur yang membawahi Human Capital, Kepatuhan dan Hukum	√	Anggota Tetap
	Direktur yang membawahi Dana dan Jaringan	√	Anggota Tetap
	SEVP yang membawahi Compliance dan Legal	x	Anggota Tetap
	Direktur/SEVP lain sesuai pembahasan	√	Anggota Tidak Tetap

Apabila Direktur Utama/Wakil Direktur Utama menghadiri Rapat Komite Pengarah Transformasi di atas maka akan bertindak sebagai Ketua dan mempunyai hak suara.

Komite Pengarah Transformasi terkait dengan IT, Digital & Network

Struktur	Jabatan	Hak Suara	Keterangan
Ketua	Direktur yang membawahi Transformasi dan Manajemen Risiko	√	(Ketua) Anggota Tetap
Direksi/SEVP	Direktur yang membawahi Teknologi Informasi	√	Anggota Tetap
	Direktur yang membawahi Dana dan Jaringan	√	Anggota Tetap
	Direktur yang membawahi Human Capital, Kepatuhan dan Hukum	X	Anggota Tidak Tetap
	SEVP yang membawahi Compliance dan Legal	X	Anggota Tidak Tetap
	Direktur/SEVP lain sesuai Pembahasan	√	Anggota Tidak Tetap

Apabila Direktur Utama/Wakil Direktur Utama menghadiri Rapat Komite Pengarah Transformasi di atas maka akan bertindak sebagai ketua dan mempunyai hak suara.

Komite Pengarah Transformasi terkait dengan Commercial Banking & Business Process, Consumer Banking & Sharia

Struktur	Jabatan	Hak Suara	Keterangan
Ketua	Direktur yang membawahi Transformasi dan Manajemen Risiko	√	Anggota Tetap
Direksi/SEVP	Direktur yang membawahi Kredit dan Pembiayaan	√	Anggota Tetap
	Direktur yang membawahi Aset Manajemen	√	Anggota Tetap
	Direktur yang membawahi Teknologi Informasi	√	Anggota Tetap
	SEVP yang membawahi Wholesale Banking	√	Anggota Tidak Tetap
	Direktur yang membawahi Human Capital, Kepatuhan dan Hukum	X	Anggota Tidak Tetap
	SEVP yang membawahi Compliance dan Legal	X	Anggota Tidak Tetap
	Direktur/SEVP lain sesuai pembahasan	√	Anggota Tidak Tetap

Apabila Direktur Utama/Wakil Direktur Utama menghadiri Rapat Komite Pengarah Transformasi di atas maka akan bertindak sebagai ketua dan mempunyai hak suara.

Komite Pengarah Transformasi terkait dengan Partnership & Project Management

Struktur	Jabatan	Hak Suara	Keterangan
Ketua	Direktur yang membawahi Transformasi dan Manajemen Risiko	√	Anggota Tetap
Direksi/SEVP	Direktur yang membawahi Keuangan	√	Anggota Tetap
	Direktur yang membawahi Human Capital, Kepatuhan dan Hukum	X	Anggota Tetap
	SEVP yang membawahi Compliance dan Legal	X	Anggota Tidak Tetap
	Direktur/SEVP lain sesuai pembahasan	√	Anggota Tidak Tetap

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE PENGARAH TRANSFORMASI

Tugas dan tanggung jawab Komite Pengarah Transformasi adalah memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama atas hal-hal yang berkaitan dengan, antara lain:

- Menentukan prioritas dan memutuskan pelaksanaan Inisiatif Transformasi sesuai Strategi Bisnis Bank, di bidang:
 - Human Capital, Organization dan Governance, Risk Management and Compliance (GRC).
 - Information Technology (IT), Digital dan Network.
 - Commercial Banking dan Business Process, Consumer Banking dan Sharia.
 - Partnership dan Project Management.
- Memutuskan kebijakan terkait pelaksanaan Pilot Project Inisiatif Transformasi.
- Mengusulkan kebijakan yang berkaitan dengan Inisiatif Transformasi untuk diputuskan pada Rapat Direksi apabila diperlukan.
- Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan Inisiatif Transformasi yang telah diputuskan oleh Komite Pengarah Transformasi, dan melaporkan kepada Direksi sebagai dasar pertimbangan keputusan tindak lanjut Inisiatif Transformasi.

PROFIL ANGGOTA KOMITE PENGARAH TRANSFORMASI

Profil anggota Komite Pengarah Transformasi baik yang berasal dari Direksi dan SEVP Perseroan dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan di bagian Profil Direksi dan Profil Pejabat Satu Level di Bawah Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

INDEPENDENSI KOMITE PENGARAH TRANSFORMASI

Seluruh anggota Komite Pengarah Transformasi tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Perseroan, yang dapat mempengaruhi kemampuan bertindak independen.

TRANSPARANSI RANGKAP JABATAN KOMITE PENGARAH TRANSFORMASI

Pengungkapan transparansi rangkap jabatan anggota Komite Pengarah Transformasi yang berasal dari Direksi dapat dilihat pada Bab Tata Kelola Perusahaan di bagian rangkap jabatan dalam Laporan Tahunan ini.

MASA JABATAN DAN PERIODE JABATAN KOMITE PENGARAH TRANSFORMASI

Masa jabatan dan periode jabatan Komite Pengarah Transformasi baik yang berasal dari Direksi maupun SEVP Perseroan mengikuti masa jabatan Direksi dan Kepala Divisi Perseroan yang menjadi anggota komite tersebut.

PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Pelatihan anggota Komite Pengarah Transformasi yang berasal dari Direksi dapat dilihat pada Sub Bab Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Anggota Direksi dalam Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

RAPAT DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE PENGARAH TRANSFORMASI TAHUN 2023

Sesuai Kebijakan Khusus No. KK.9-D tanggal 27 Maret 2023 tentang Prosedur Tata Kelola Komite Direksi, Pelaksanaan rapat Komite Pengarah Transformasi dilakukan paling kurang 2 (dua) kali selama tahun berjalan. Selama tahun 2023, Komite Pengarah Transformasi telah mengadakan rapat sebanyak 26 (dua puluh enam) kali. Adapun tanggal dan agenda rapat adalah sebagai berikut.

No.	Tanggal	Agenda
1	5 Januari 2023	Steering Committee Project Sign Off Branch Transformation
2	11 Januari 2023	Steering Committee Update Inisiatif Corporate Plan - Perbaikan Tata Kelola Dokumen Kredit
3	17 Januari 2023	Steering Committee Decision Engine Consumer
4	10 Februari 2023	Steering Committee Sentra Proses UMKM
5	15 Februari 2023	Steering Committee Update Inisiatif Corplan - Perbaikan Tata Kelola Dokumen Kredit
6	23 Februari 2023	Steering Committee Presentasi Rencana Kerja Sama Dana Ventura Oleh PT Mandiri Capital Indonesia
7	12 April 2023	Steering Committee Penunjukan Unit Pengelola Literasi dan Inklusi Keuangan

No.	Tanggal	Agenda
8	26 April 2023	Steering Committee Single Relationship Model Segmen Korporasi
9	22 Mei 2023	Steering Committee Pembahasan Collection SME
10	25 Mei 2023	Steering Committee Usulan Struktur Organisasi CRSD 1, CRSD 2 dan CAMD
11	16 Juni 2023	Steering Committee Project Ultimate
12	21 Juni 2023	Steering Committee Project Ultimate (Wholesale Transaction Banking)
13	13 Juli 2023	Steering Committee Progress Update Persiapan Pilot Project Ultimate
14	14 Juli 2023	Steering Committee Single Relationship Model Segmen Korporasi
15	1 Agustus 2023	Steering Committee Decision Engine Consumer
16	1 Agustus 2023	Steering Committee Integrasi LOS
17	8 Agustus 2023	Steering Committee SBU Project
18	10 Agustus 2023	Steering Committee SBU Project
19	30 Agustus 2023	Steering Committee Ultimate Project - Report Hasil Pilot
20	19 September 2023	Steering Committee Rencana Pelaksanaan Investasi Bank BTN pada Dana Ventura
21	27 September 2023	Steering Committee Progress Pilot Project Ultimate September 2023
22	10 Oktober 2023	Steering Committee Pembahasan Pengelolaan DPK Institusi
23	30 Oktober 2023	Steering Committee Update Pilot dan Scale Up Ultimate Project Oktober 2023
24	7 Desember 2023	Steering Committee BPI KRING
25	11 Desember 2023	Steering Committee Single RM Korporasi dan Large Commercial
26	14 Desember 2023	Steering Committee Project Strategic Business Unit

Komite Bisnis

Komite Bisnis merupakan Komite Perseroan yang berperan dalam merumuskan, memutuskan, mengawasi, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dan strategi bisnis terkait dengan produk dan aktivitas yang akan dan telah diluncurkan oleh Perseroan untuk memantau perkembangan dan memberikan saran langkah perbaikan terkait dengan bisnis Perseroan.

PEDOMAN KERJA KOMITE BISNIS

Pedoman kerja Komite Bisnis mengacu pada Kebijakan Khusus No. KK.9-D tanggal 27 Maret 2023 tentang Prosedur Tata Kelola Komite Direksi.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE BISNIS

1. Komite Bisnis bertanggung jawab atas keputusan yang diputus dalam Rapat Komite Bisnis maupun Rapat Direksi.
2. Komite Bisnis bertanggung jawab menyampaikan laporan atas Keputusan Signifikan yang dibuat kepada Rapat Direksi minimal 1 (satu) tahun sekali.
3. Menetapkan langkah-langkah perbaikan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan Produk Bank serta melaporkan kepada Direksi.

STRUKTUR KEANGGOTAAN KOMITE BISNIS

Berdasarkan kesepakatan, Keanggotaan Komite Bisnis diduduki oleh beberapa jabatan dengan rincian sebagai berikut:

No	Struktur Keanggotaan	Jabatan	Hak Suara	Keterangan
1	Ketua (merangkap anggota tetap)	Wakil Direktur Utama	√	(Ketua) Anggota Tetap
2	Direksi/SEVP Anggota Tetap	Direktur yang membawahi Dana dan Jaringan*	√	Anggota Tetap
		Direktur yang membawahi Kredit dan Pembiayaan	√	Anggota Tetap
		Direktur yang membawahi Manajemen Risiko	√	Anggota Tetap
		Direktur yang membawahi Teknologi Informasi	√	Anggota Tetap
		Direktur yang membawahi Institutional Banking	√	Anggota Tetap
		Direktur yang membawahi Human Capital, Kepatuhan dan Hukum	X	Anggota Tetap
		SEVP yang membawahi Wholesale Banking	√	Anggota Tetap
		SEVP yang membawahi Operasional	√	Anggota Tetap
		Direktur yang membawahi Keuangan	√	Anggota Tidak Tetap
		Direktur yang membawahi Aset Manajemen	√	Anggota Tidak Tetap
		SEVP yang membawahi Compliance dan Legal	X	Anggota Tidak Tetap

- a. Apabila Direktur Utama menghadiri rapat Komite Bisnis, maka bertindak sebagai ketua.
 b. Rapat Komite Bisnis dinyatakan mencapai kuorum apabila dihadiri maksimal lebih dari ½ (satu per dua) dari jumlah Anggota Tetap.
 c. *Ketua Pengganti I

PROFIL ANGGOTA KOMITE BISNIS

Profil anggota Komite Bisnis baik yang berasal dari Direksi dan SEVP Perseroan dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan di bagian Profil Direksi dan Profil Pejabat Satu Level di Bawah Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

INDEPENDENSI KOMITE BISNIS

Seluruh anggota Komite Bisnis tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Perseroan, yang dapat mempengaruhi kemampuan bertindak independen.

TRANSPARANSI RANGKAP JABATAN KOMITE BISNIS

Pengungkapan transparansi rangkap jabatan anggota Komite Bisnis yang berasal dari Direksi dapat dilihat pada Bab Tata Kelola Perusahaan di bagian rangkap jabatan dalam Laporan Tahunan ini.

MASA JABATAN DAN PERIODE JABATAN KOMITE BISNIS

Masa jabatan dan periode jabatan Komite Bisnis baik yang berasal dari Direksi maupun SEVP Perseroan mengikuti masa jabatan Direksi dan Kepala Divisi Perseroan yang menjadi anggota komite tersebut.

PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Pelatihan anggota Komite Bisnis yang berasal dari Direksi dapat dilihat pada Sub Bab Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Anggota Direksi dalam Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

PELAKSANAAN TUGAS KOMITE BISNIS TAHUN 2023

Sesuai kebijakan Khusus No. KK.9-D tanggal 27 Maret 2023 tentang Prosedur Tata Kelola Komite Direksi, Pelaksanaan Rapat Komite Bisnis dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Selama tahun 2023, Komite Bisnis telah melaksanakan rapat sebanyak 6 (enam) kali. Adapun tanggal dan agenda Rapat Komite Bisnis yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

No.	Tanggal	Agenda
1	04 April 2023	Komite Bisnis terkait KRING Hunian Kreasi
		Komite Bisnis terkait Pembiayaan Kendaraan Listrik
		Komite Bisnis terkait Pengenaan Charge Pengembalian Dokumen Pokok
2	03 Agustus 2023	Komite Bisnis terkait KPR Maju
3	28 Agustus 2023	Komite Bisnis terkait Partnership IFG Life
4	5 September 2023	Komite Bisnis terkait KRING Ultimate (<i>Ultimate Project</i>)

No.	Tanggal	Agenda
5	17 Oktober 2023	Komite Bisnis terkait Pembiayaan Multiguna (Soft Financing) Karyawan
6	15 Desember 2023	Komite Bisnis terkait Asset Buy Bukopin Syariah
		Komite Bisnis terkait <i>Channeling</i> Kopnupos

Komite *Environmental, Social and Governance*

Komite *Environmental, Social and Governance* (ESG) yang dibentuk untuk mencapai *Sustainable Development Goals* dan target *Climate*, berperan dalam memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama untuk merumuskan kebijakan, strategi dan sasaran yang berdampak terhadap lingkungan, sosial dan tata kelola serta sarana dalam melakukan *monitoring* dan pengambilan keputusan terkait pelaksanaan program ESG dan TJSI Perseroan.

PEDOMAN KERJA KOMITE *ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE*

Pedoman kerja Komite *Environmental, Social and Governance* (ESG) mengacu pada Kebijakan Khusus No. KK.9-D tanggal 27 Maret 2023 tentang Prosedur Tata Kelola Komite Direksi

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE *ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE*

Tugas Komite *Environmental, Social and Governance* (ESG) adalah melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama terkait ESG antara lain:

1. Menetapkan langkah-langkah perbaikan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Program ESG dan TJSI mencakupi *Community Development*, Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (PUMK), Rencana Aksi Keuangan Keberlanjutan, serta kegiatan bisnis dalam rangka tanggung jawab Bank kepada masyarakat atas risiko bisnis yang ditimbulkan oleh Bank dan melaporkannya kepada Direksi.
2. Memberikan keputusan atas strategi Bank yang berdampak terhadap lingkungan, sosial dan masyarakat dalam Program dan *Roadmap* ESG;
3. Memantau penerapan monitoring atas implementasi Strategi dan *Roadmap* ESG Bank;
4. Memberikan informasi kepada manajemen Bank mengenai seluruh isu terkait ESG, termasuk perundang-undangan, program pemerintah, perkembangan internasional, tren bisnis ke depan, dan perubahan iklim;
5. Melakukan pemantauan, evaluasi, dan memberikan rekomendasi terhadap hasil laporan ESG, investor *concern*, atau pihak ketiga lainnya terhadap implementasi ESG; dan
6. Memberikan keputusan terkait :
 - a. Tujuan dan petunjuk pelaksanaan Program TJSI;
 - b. Pemetaan dan penyusunan Program TJSI; dan
 - c. Evaluasi atas pelaksanaan Program TJSI

STRUKTUR KEANGGOTAAN KOMITE ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE

Komite *Environmental, Social and Governance* (ESG) memiliki susunan sebagai berikut:

Struktur Keanggotaan	Jabatan	Hak Suara	Keterangan
Ketua	Direktur Utama	√	(Ketua) Anggota Tetap
Direksi	Wakil Direktur Utama*	√	Anggota Tetap
	Direktur yang membawahi Manajemen Risiko **)	√	Anggota Tetap
	Direktur Finance	√	Anggota Tetap
	Direktur Asset Manajemen	√	Anggota Tetap
	Direktur Human Capital, Compliance & Legal	X	Anggota Tetap
Direksi/SEVP	SEVP Wholesale Banking	√	Anggota Tetap
	Direktur/SEVP lain sesuai materi pembahasan	√	Anggota Tidak Tetap
	SEVP yang membawahi Compliance and Legal	X	Anggota Tidak Tetap

*) Ketua Pengganti I

**) Ketua Pengganti II

PROFIL ANGGOTA KOMITE ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE

Profil anggota Komite *Environmental, Social and Governance* (ESG) baik yang berasal dari Direksi dan SEVP Perseroan dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan di bagian Profil Direksi dan Profil Pejabat Satu Level di Bawah Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

INDEPENDENSI KOMITE ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE

Seluruh anggota Komite *Environmental, Social and Governance* (ESG) tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Perseroan, yang dapat mempengaruhi kemampuan bertindak independen.

TRANSPARANSI RANGKAP JABATAN KOMITE ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE

Pengungkapan transparansi rangkap jabatan anggota Komite *Environmental, Social and Governance* (ESG) yang berasal dari Direksi dapat dilihat pada Bab Tata Kelola Perusahaan di bagian rangkap jabatan dalam Laporan Tahunan ini.

MASA JABATAN DAN PERIODE JABATAN KOMITE ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE

Masa jabatan dan periode jabatan Komite *Environmental, Social and Governance* (ESG) baik yang berasal dari Direksi maupun SEVP Perseroan mengikuti masa jabatan Direksi dan Kepala Divisi Perseroan yang menjadi anggota komite tersebut.

PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Pelatihan anggota Komite *Environmental, Social and Governance* (ESG) yang berasal dari Direksi dapat dilihat pada Sub Bab Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Anggota Direksi dalam Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

PELAKSANAAN TUGAS KOMITE ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE TAHUN 2023

Selama tahun 2023, Komite ESG telah menyusun *Framework*, *Strategi*, *Roadmap* dan *Quickwins* ESG. Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum

Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum

Komite Remunerasi dan Nominasi

Terkait aspek remunerasi, Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi yang didasarkan atas kinerja, risiko, kewajaran dengan *peer group*, sasaran, dan strategi jangka panjang Perseroan, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan dan potensi pendapatan

Perseroan di masa yang akan datang. Adapun uraian terkait nama anggota, komposisi, tugas dan tanggung jawab serta jumlah rapat Komite telah disajikan dalam Sub Bab Komite Remunerasi dan Nominasi dalam Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Berdasarkan Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik Pasal 10 ayat 2 dan 3, Perseroan memberikan paket remunerasi tahun 2023 kepada anggota Komite Remunerasi dan Nominasi di luar dari anggota Dewan Komisaris dan seorang pejabat eksekutif (*ex officio*) dalam tabel berikut:

Komite Remunerasi dan Nominasi	Jumlah Remunerasi yang Diterima (Honorarium, THR dan Tunjangan PPh 21)
Moch. Amin Nurdin	1,063,313,528
Total	1,063,313,528



Proses Penyusunan Kebijakan Remunerasi

Dalam pemberian remunerasi, di tahun 2023 telah diterbitkan ketentuan baru yang menyempurnakan ketentuan sebelumnya yaitu dengan diterbitkannya Kebijakan Khusus (KK) No.3-B tanggal 31 Oktober 2023 tentang Remunerasi. Pengelolaan Sumber Daya Manusia atau *Human Capital* menjadi salah satu prioritas terpenting dalam menjalankan roda Perseroan. Remunerasi pegawai merupakan suatu sistem penggajian dan kompensasi yang diterapkan Perseroan untuk memberi imbalan kepada Pegawai berdasarkan sejumlah faktor.

Adapun cakupan sistem remunerasi tersebut antara lain tata kelola dalam pemberian remunerasi, kompensasi, benefit, kompensasi benefit berdasarkan peraturan Perundang-Undang dan penghargaan. Penerapan tata kelola dalam pemberian remunerasi bertujuan untuk mendorong dilakukannya *prudential banking* yaitu pengambilan risiko dalam melakukan kegiatan usaha dilakukan secara terukur dan mengacu pada ketentuan perundang-undangan mengenai manajemen risiko sehingga pengambilan risiko yang berlebihan (*excessive risk taking*) oleh pengambil keputusan dapat dihindari dan kelangsungan usaha serta kesehatan Perseroan dapat terjaga.

Kebijakan remunerasi yang disusun wajib paling sedikit mempertimbangkan :

- a. Terciptanya manajemen risiko yang efektif
- b. Stabilitas keuangan Perseroan
- c. Kecukupan dan penguatan permodalan Perseroan
- d. Kebutuhan likuiditas jangka pendek dan jangka panjang
- e. Potensi pendapatan di masa yang akan datang.

Cakupan Kebijakan Remunerasi dan Implementasinya per Unit Bisnis, Per Wilayah dan Pada Perusahaan Anak Atau Kantor Cabang Yang Berlokasi di Luar Negeri

Kebijakan remunerasi Perseroan telah mempertimbangkan wilayah geografis Kantor Pusat, Kantor Wilayah dan Kantor Cabang bersangkutan. Perseroan memiliki kebijakan memberikan tunjangan regional untuk daerah-daerah tertentu sesuai dengan keputusan Direksi sebagaimana ketentuan KK 3-B tahun 2023 tentang Remunerasi serta diimplementasikan sebagaimana ketentuan.

Remunerasi Dikaitkan dengan Risiko

Dalam menetapkan risiko yang dikaitkan dengan Remunerasi yang bersifat variabel, Perseroan memperhatikan risiko yang paling berpengaruh dalam kegiatan usaha sebagai risiko utama mengacu pada ketentuan regulator yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi Bank umum. Remunerasi yang dikaitkan dengan kinerja dan risiko di antaranya yaitu bonus atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Pengukuran Kinerja Dikaitkan dengan Remunerasi

1. Kebijakan Remunerasi dikaitkan dengan penilaian kinerja Perseroan memiliki kebijakan tentang Sistem Manajemen Kinerja yang mengatur bahwa kenaikan gaji berdasarkan *pay for performance* diatur dalam ketentuan tersendiri tentang Kebijakan Gaji Dasar.
2. Metode yang mengaitkan Remunerasi individu dengan kinerja Perseroan, kinerja unit kerja dan kinerja individu Kebijakan dalam Sistem Manajemen Kinerja Perseroan mengatur tentang Penilaian Sasaran kinerja yang meliputi Sasaran Kerja meliputi Sasaran Kerja Perusahaan (SKP), Sasaran Kerja Unit (SKU) dan Sasaran Kerja Individu (SKI). Penilaian sasaran kerja dilakukan dengan membandingkan realisasi pencapaian sasaran kerja dengan target sasaran kerja masing-masing. Dalam Kebijakan Sistem Manajemen Kinerja Perseroan juga mengatur penilaian terhadap kompetensi budaya perusahaan dan kompetensi leadership bagi pegawai yang memiliki bawahan.
3. Metode yang digunakan Perseroan untuk menyatakan bahwa kinerja yang disepakati tidak dapat tercapai sehingga perlu dilakukan penyesuaian atas remunerasi serta besarnya penyesuaian remunerasi jika kondisi tersebut terjadi.

Metode Penyesuaian remunerasi terkait pencapaian kinerja, dilakukan perseroan melalui kebijakan kenaikan gaji pokok setiap tahun ditentukan oleh nilai Sistem Manajemen Kinerja tahun sebelumnya dan *Comparatio*. Dalam hal ini *Comparatio* dapat diartikan nilai prosentase yang dihitung berdasarkan posisi gaji pokok Pegawai Tetap terhadap midpoint pada range Gaji Pokok golongan jabatan yang dipegang Pegawai Tetap yang bersangkutan. Dalam rangka mempertahankan pegawai yang berkualitas, Perseroan memberikan Jasa Produksi sebagai salah satu bentuk remunerasi yang dikaitkan langsung dengan penilaian kinerja Pegawai yang terefleksi dalam Sistem Manajemen Kinerja (SMK).

Penyesuaian Remunerasi Dikaitkan dengan Kinerja dan Risiko

Perseroan dapat menunda pembayaran remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan (*Malus*) atau menarik kembali remunerasi yang bersifat variabel yang sudah dibayarkan (*Clawback*) kepada pejabat yang tergolong *Material Risk Taker* (MRT), dengan mempertimbangkan beberapa faktor antara lain:

1. Besarnya kerugian atau kerusakan reputasi Perseroan.
2. Keterlibatan pegawai bersangkutan secara langsung maupun tidak langsung terkait tindakan atau transaksi yang dilakukan.

Pihak yang menjadi *Material Risk Takers* paling sedikit memenuhi kriteria berikut:

1. Direksi dan/atau Pegawai lainnya yang karena tugas dan tanggung jawabnya mengambil keputusan yang berdampak signifikan terhadap profil risiko Perseroan; atau

2. Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Pegawai yang memperoleh remunerasi yang bersifat variabel dengan nilai yang besar.

Sebagai implementasi ketentuan penangguhan pembayaran Tantiem pada tahun 2023 telah dilakukan penangguhan pembayaran Tantiem sebagaimana ketentuan internal maupun ketentuan eksternal dalam hal ini Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara.

Jangka waktu penangguhan remunerasi bersifat variabel kepada *Material Risk Takers (MRT)* paling sedikit selama 3 (tiga) tahun, dengan persentase yang ditangguhkan ditetapkan sebesar 10% sampai dengan 30% dari remunerasi variabel yang diterima dimana penetapan persentase yang ditangguhkan tersebut ditetapkan oleh Direksi.

Implementasi *Malus* akan dikenakan kepada Pejabat yang tergolong *Material Risk Takers* dengan kriteria kondisi dan/atau sebagai berikut:

1. Menyebabkan kerusakan reputasi Perseroan yang signifikan atau berdampak negatif terhadap finansial Perseroan maupun kesempatan bisnis Perseroan.
2. Menyebabkan kerugian keuangan Perseroan yang signifikan.

3. Melakukan kecurangan (*fraud*), perilaku tidak etis, dan/atau pemalsuan catatan.
4. Menyebabkan risiko material atau memberikan pernyataan finansial yang salah.
5. Melakukan pelanggaran terhadap kebijakan peraturan dan prosedur Perseroan secara sengaja.
6. Menyebabkan kerugian yang signifikan untuk unit kerja terkait dikarenakan tidak dilaksanakannya manajemen risiko yang baik.
7. Menyebabkan dampak negatif yang signifikan terhadap permodalan Perseroan yang tidak disebabkan oleh perubahan iklim ekonomi atau industri.
8. Melakukan pengungkapan informasi rahasia Perseroan kepada pihak eksternal secara sengaja.
9. Melakukan tindakan yang dapat menyebabkan pegawai determinasi dari Perseroan.

Nama Konsultan Ekstern dan Tugas Konsultan Terkait Kebijakan Remunerasi

Bank BTN bekerja sama dengan Willis Towers Watson yang bertugas untuk melakukan *benchmarking* dan/atau *Salary Survey* sesuai dengan permintaan perusahaan mengenai kebijakan remunerasi.

Paket Remunerasi dan Fasilitas yang Diterima oleh Direksi dan Dewan Komisaris

Remunerasi dan fasilitas yang diterima oleh Direksi dan Dewan Komisaris dalam 1 (satu) tahun mencakup struktur remunerasi dan rincian jumlah nominal, sebagaimana tabel di bawah ini:

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lainnya	Dewan Komisaris		Direksi	
	Orang	Juta Rp.	Orang	Juta Rp.
Remunerasi				
Honorarium/Gaji	9	15.728	11 ²⁾	37.939
Tunjangan rutin (Tj. PPh21)	9	8.690	11 ²⁾	24.331
Tunjangan Hari Raya	9	1.373	10	3.219
Tantiem	8 ¹⁾	33.978	9 ³⁾	85.896
Total Remunerasi (a)	-	59.769	-	151.385
Asuransi Purna Jabatan	9	4.614	11 ²⁾	10.144
Tunjangan Perumahan	-	-	3	509
Tunjangan Transportasi	9	3.049	11	1.477
Tunjangan Komunikasi	-	-	11	154
Total Fasilitas Lainnya (b)	-	7.663	-	12.284
Total Diterima (a) + (b)	-	67.432	-	163.669

Keterangan:

1) 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris diantaranya tidak menjabat lagi sejak 12 Agustus 2023 karena meninggal dunia

2) 1 (satu) orang anggota Direksi diantaranya tidak menjabat lagi setelah RUPS Tahunan tanggal 16 Maret 2023

3) 2 (dua) orang anggota Direksi diangkat sejak RUPS Tahunan tanggal 16 Maret 2023

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi dalam satu tahun dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan sebagai berikut:

Jumlah Remunerasi	Jumlah Dewan Komisaris		Jumlah Direksi	
	2023	2022	2023	2022
Di atas Rp 2 Miliar	10 ³⁾	10 ¹⁾	11 ⁴⁾	9
Di atas Rp 1 Miliar - Rp 2 Miliar	-	-	-	1 ²⁾
Di atas Rp 500 juta - Rp 1 Miliar	1 ⁵⁾	-	-	-
Rp 500 juta ke bawah	-	-	-	-

Keterangan :

- 1) Termasuk 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris tidak menjabat lagi setelah RUPS Tahunan tanggal 02 Maret 2022.
- 2) Jumlah anggota Direksi yang tidak menjabat lagi setelah RUPS Tahunan tanggal 10 Maret 2021.
- 3) Termasuk 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris tidak menjabat lagi tmt. 14 Oktober 2022.
- 4) Termasuk 1 (satu) orang anggota Direksi tidak menjabat lagi setelah RUPS Tahunan tanggal 16 Maret 2023.
- 5) Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak menjabat lagi setelah RUPS Tahunan tanggal 02 Maret 2022.

Remunerasi yang Bersifat Variabel

Berdasarkan Surat Edaran Direksi No. 57/DIR/HCD/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi, komponen remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi ada yang bersifat variabel, yaitu Remunerasi yang bersifat tidak tetap diberikan dalam bentuk tunai dan saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank BTN.

Jumlah Direksi, Dewan Komisaris dan Pegawai yang Menerima Remunerasi yang Bersifat Variabel Selama 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi, Dewan Komisaris, dan Pegawai yang menerima Remunerasi yang Bersifat Variabel selama 1 (satu) tahun dan total nominalnya.

Jumlah yang diterima											
Direksi				Dewan Komisaris				Pegawai ²⁾			
Orang		Juta Rp		Orang		Juta Rp		Orang		Juta Rp	
2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
9 ²⁾	10 ¹⁾	85.896	65.937	10 ³⁾	7	38.204	24.782	11.858	11.355	609.329	565.140

Keterangan :

- 1) 1 (satu) orang anggota Direksi tidak menjabat lagi setelah RUPS Tahunan tanggal 10 Maret 2021.
- 2) 1 (satu) orang anggota Direksi tidak menjabat lagi setelah RUPS Tahunan tanggal 16 Maret 2023.
- 3) 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris tidak menjabat lagi tmt. 14 Oktober 2022 dan 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris tidak menjabat lagi setelah RUPS Tahunan tanggal 02 Maret 2022.
- 4) Terdiri dari pegawai yang menerima Jasa Produksi / Bonus

Jabatan dan Jumlah Pihak yang Menjadi Material Risk Takers (MRT)

Dalam menetapkan pegawai yang diidentifikasi sebagai MRT, Bank melakukan pendekatan secara kualitatif. Jabatan yang tergolong MRT sebagai berikut:

1. Direktur Utama dan seluruh anggota Direksi untuk implementasi tahun 1 sampai dengan tahun 3.
2. Direktur Utama, seluruh anggota Direksi, Kepala Divisi Bisnis, Kepala kantor Wilayah, dan Kepala Cabang untuk implementasi tahun ke 4 dan setelahnya.
3. Penetapan jabatan kepala Divisi Bisnis yang tergolong MRT ditetapkan Direksi pada saat kebijakan tersebut diimplementasikan.

No.	Jabatan	Jumlah Pihak yang Menjadi MRT
1	Direktur Utama	1
2	Wakil Direktur Utama	1
3	Direktur	7

No.	Jabatan	Jumlah Pihak yang Menjadi MRT
4	Komisaris Utama	1
5	Wakil Komisaris Utama	1
6	Anggota Dewan Komisaris	6

Shares Option yang Dimiliki Direksi, Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif

Perseroan memiliki program kepemilikan saham oleh manajemen atau *Management Stock Option Program* (MSOP) dan oleh pegawai atau *Employee Stock Option Program* (ESOP) sebagai bagian dari apresiasi terhadap manajemen dan seluruh pegawai. Kebijakan pemberian *shares option* dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang diselenggarakan pada tanggal 6 Oktober 2009 telah menyetujui pengeluaran saham baru dalam simpanan Perseroan sebanyak-banyaknya 30% atau sebanyak-banyaknya 2.723.142.857 saham dari total saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh setelah

pengeluaran saham baru sehingga kepemilikan Negara RI menjadi paling sedikit 70% atau 6.354.000.000 saham dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh setelah pengeluaran saham baru.

Pengeluaran saham baru dalam simpanan dimaksud, ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Saham Perdana atau *Initial Public Offering* (IPO) yang di dalamnya sudah termasuk penjabatan saham untuk Manajemen dan Pegawai atau *Management and Employee Stock Allocation* (MESA) serta pemberian hak opsi kepada Manajemen dan Pegawai atau *Management and Employee Stock Options Plan* (MESOP).

Pengungkapan *Shares Option* Tahap 1, 2, 3 Direksi, Komisaris dan Pejabat Eksekutif Bank per 31 Desember 2023

MESOP Tahap 1

No	Nama dan Jabatan	Jumlah Saham Yang Dimiliki (Lembar Saham)	Jumlah Opsi		Harga Opsi (Rp.)	Jangka Waktu
			Yang Diberikan (Lembar Saham)	Yang Telah Dieksekusi (Lembar Saham)		
Dewan Komisaris						
1	Chandra M. Hamzah	-	-	-	-	-
2	Iqbal Latanro	-	-	-	-	-
3	Ahdi Jumhari Luddin	-	-	-	-	-
4	Andin Hadiyanto	-	-	-	-	-
5	Armand B. Arief	-	-	-	-	-
6	Herry Trisaputra Zuna	-	-	-	-	-
7	Himawan Arief S.	-	-	-	-	-
8	Sentot A. Sentausa	-	-	-	-	-
Direksi						
1	Haru Koesmahargyo	-	-	-	-	-
2	Nixon L. P. Napitupulu	-	-	-	-	-
3	Andi Nirwoto	-	-	-	-	-
4	Jasmin	-	-	-	-	-
5	Setiyo Wibowo	-	-	-	-	-
6	Elisabeth Novie Riswanti	-	76.500	76.500	855	Feb 2011-Ags 2014
7	Hirwandi Gafar	-	58.000	58.000	855	Feb 2011-Ags 2014
8	Nofry Rony Poetra	-	77.000	77.000	855	Feb 2011-Ags 2014
9	Eko Waluyo	-	51.000	51.000	855	Feb 2011-Ags 2014
Pejabat Eksekutif		7.430.600	6.925.500	6.925.500	855	Feb 2011-Ags 2014
Pegawai		-	136.751.500	136.751.500	855	Feb 2011-Ags 2014

MESOP Tahap 2

No	Nama dan Jabatan	Jumlah Saham Yang Dimiliki (Lembar Saham)	Jumlah Opsi		Harga Opsi (Rp.)	Jangka Waktu
			Yang Diberikan (Lembar Saham)	Yang Telah Dieksekusi (Lembar Saham)		
Dewan Komisaris						
1	Chandra M. Hamzah	-	-	-	-	-
2	Iqbal Latanro	-	-	-	-	-
3	Ahdi Jumhari Luddin	-	-	-	-	-
4	Andin Hadiyanto	-	-	-	-	-
5	Armand B. Arief	-	-	-	-	-
6	Herry Trisaputra Zuna	-	-	-	-	-
7	Himawan Arief S.	-	-	-	-	-

No	Nama dan Jabatan	Jumlah Saham Yang Dimiliki (Lembar Saham)	Jumlah Opsi		Harga Opsi (Rp.)	Jangka Waktu
			Yang Diberikan (Lembar Saham)	Yang Telah Dieksekusi (Lembar Saham)		
8	Sentot A. Sentausa	-	-	-	-	-
Direksi						
1	Haru Koesmahargyo	-	-	-	-	-
2	Nixon L. P. Napitupulu	-	-	-	-	-
3	Andi Nirwoto	-	-	-	-	-
4	Jasmin	-	-	-	-	-
5	Setiyo Wibowo	-	-	-	-	-
6	Elisabeth Novie Riswanti	-	55.000	55.000	1.297,44	Feb 2012-Ags 2015
7	Hirwandi Gafar	-	43.000	43.000	1.297,44	Feb 2012-Ags 2015
8	Nofry Rony Poetra	-	59.500	59.500	1.297,44	Feb 2012-Ags 2015
9	Eko Waluyo	-	41.000	41.000	1.297,44	Feb 2012-Ags 2015
Pejabat Eksekutif		7.430.600	5.467.500	5.467.500	1.297,44	Feb 2012-Ags 2015
Pegawai		-	102.442.500	102.442.500	1.297,44	Feb 2012-Ags 2015

MESOP Tahap 3

No	Nama dan Jabatan	Jumlah Saham Yang Dimiliki (Lembar Saham)	Jumlah Opsi		Harga Opsi (Rp.)	Jangka Waktu
			Yang Diberikan (Lembar Saham)	Yang Telah Dieksekusi (Lembar Saham)		
Dewan Komisaris						
1	Chandra M. Hamzah	-	-	-	-	-
2	Iqbal Latanro	-	-	-	-	-
3	Ahdi Jumhari Luddin	-	-	-	-	-
4	Andin Hadiyanto	-	-	-	-	-
5	Armand B. Arief	-	-	-	-	-
6	Herry Trisaputra Zuna	-	-	-	-	-
7	Himawan Arief S.	-	-	-	-	-
8	Sentot A. Sentausa	-	-	-	-	-
Direksi						
1	Haru Koesmahargyo	-	-	-	-	-
2	Nixon L. P. Napitupulu	-	-	-	-	-
3	Andi Nirwoto	-	-	-	-	-
4	Jasmin	-	-	-	-	-
5	Setiyo Wibowo	-	-	-	-	-
6	Elisabeth Novie Riswanti	-	56.000	56.000	1.098,36	Feb 2013-Ags 2016
7	Hirwandi Gafar	-	47.500	47.500	1.098,36	Feb 2013-Ags 2016
8	Nofry Rony Poetra	-	61.500	61.500	1.098,36	Feb 2013-Ags 2016
9	Eko Waluyo	-	44.500	44.500	1.098,36	Feb 2013-Ags 2016
Pejabat Eksekutif		7.430.600	5.566.500	5.566.500	1.098,36	Feb 2013-Ags 2016
Pegawai		-	102.367.500	102.367.500	1.098,36	Feb 2013-Ags 2016

Program MESA dan MESOP telah selesai dieksekusi pada tahun 2016. Sejak saat itu Bank BTN tidak ada program *Share Option* untuk Direksi, Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif dan Pegawai.

Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Rasio Gaji	2023	2022
Gaji Pegawai Tertinggi dan Terendah	22,44 : 1	22,34 : 1
Gaji Direksi Tertinggi dan Terendah	1,18 : 1	1,18 : 1
Gaji Komisaris Tertinggi dan Terendah	1,11 : 1	1,11 : 1
Gaji Direksi Tertinggi dan Pegawai Tertinggi	2,92 : 1	2,90 : 1

Keterangan :

*Gaji pegawai tertinggi adalah pegawai tetap dengan gaji tertinggi.

*Gaji pegawai terendah adalah pegawai tetap dengan gaji terendah.

Jumlah Penerima dan Jumlah Total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang Dijamin tanpa Syarat

Bank BTN tidak memiliki kebijakan pemberian Remunerasi yang Bersifat Variabel (RBV) dan tanpa syarat, karena kebijakan pemberian RBV diberlakukan seragam tanpa mempertimbangkan lama periode bekerja. Bank BTN berkomitmen untuk menerapkan sistem remunerasi yang kompetitif, adil dan seimbang dan selalu memastikan bahwa tidak ada pegawai yang menerima imbalan di bawah ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Bank BTN juga melakukan kaji ulang dan pengujian atas kebijakan remunerasi agar relevan dengan perkembangan industri dan strategi bisnis serta mengadopsi aspek-aspek kepatuhan pada ketentuan perbankan yang berlaku terkait remunerasi secara bertahap.

Jumlah Pegawai yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja dan Total Nominal Pesangon Yang Dibayarkan

Tabel Program Pensiu Sukarela Terbatas (PPST)

No.	Jumlah nominal Pesangon yang dibayarkan per Orang dalam 1 (satu) Tahun	Jumlah Pegawai PPST	
		2023	2022
1.	Di atas Rp 1 miliar	-	1
2.	Di atas Rp 500 juta - 1 miliar	6	9
3.	Rp 500 juta ke bawah	1	-

Jumlah Total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang Ditangguhkan

Remunerasi Yang Bersifat Variabel yang Ditangguhkan Tahun 2023		Remunerasi Yang Bersifat Variabel yang Ditangguhkan Tahun 2022	
Tunai	Rp 4.961 juta	Tunai	Rp 1.510 juta
Saham	13.398.206 (lembar)	Saham	5.018.840 (lembar)

Jumlah Total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang Ditangguhkan yang Dibayarkan Selama 1 (Satu) Tahun

Remunerasi Yang Bersifat Variabel yang Ditangguhkan Tahun 2023		Remunerasi Yang Bersifat Variabel yang Ditangguhkan Tahun 2022	
Tunai	Rp 603.096.246	Tunai	Rp 458.925.047
Saham	1.757.934 (lembar)	Saham	1.044.300 (lembar)

Jumlah Remunerasi yang Diberikan dalam Satu Tahun

A. Remunerasi yang Bersifat Tetap

Jenis Remunerasi	Jumlah
Tunai	111.227 juta
Saham/instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank BTN	-

B. Remunerasi yang Bersifat Variabel

Jenis Remunerasi	Tidak Ditangguhkan	Ditangguhkan
Tunai	Rp 65.256 juta	Rp 3.811 juta
Saham	-	10.204.900 (lembar)

Informasi Kuantitatif

Jenis Remunerasi Yang Bersifat Variabel	Tidak Ditangguhkan	Ditangguhkan
Tunai	Rp 65.256 juta	Rp 4.961 juta
Saham	-	13.398.206 (lembar)



Akuntan Publik

Fungsi Audit Eksternal

Perseroan menunjuk Auditor Ekstern untuk melaksanakan audit atas Laporan Keuangan Tahun Buku 2023. Hal tersebut dalam rangka pemenuhan terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.03/2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan. Auditor Eksternal dituntut untuk mampu memberikan informasi dan data yang akuntabel, independen, dan wajar khususnya atas aspek keuangan, operasional, dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

Audit eksternal dilakukan oleh pihak independen yang telah memenuhi persyaratan untuk memastikan bahwa pencatatan akuntansi Perseroan diwajibkan melakukan pelaporan profil Risiko Bank secara *bankwide*. Laporan profil risiko tersebut mencakup penilaian terhadap Risiko Inheren dan penilaian terhadap Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Perseroan yang disusun sesuai dengan ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi dan Keuangan (PSAK) dan laporan yang disiapkan menyajikan posisi keuangan dan hasil usaha secara wajar serta operasional usaha yang dijalankan Perseroan tidak menyalahi ketentuan Regulasi yang berlaku.

Penunjukkan Akuntan Publik

Perseroan menetapkan kantor akuntan publik (KAP) melalui RUPS dalam rangka kebutuhan atas Audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2023. Penunjukan Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik dilakukan melalui mekanisme tender pengadaan jasa audit umum, dengan kualifikasi sebagai berikut:

1. Merupakan Kantor Akuntan Publik yang masuk dalam peringkat 10 besar (peringkat berdasarkan asosiasi Kantor Akuntan Publik resmi);
2. Memiliki pengalaman melakukan general audit pada Bank yang telah *go public* dan memiliki aset minimal Rp100 triliun;
3. Memiliki sertifikat berafiliasi dengan KAP internasional;
4. Memiliki pengalaman mengaudit Bank umum dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL);
5. Termasuk dalam KAP yang terdaftar di OJK, Kementerian Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan;

6. AP tidak sedang terkena sanksi oleh OJK, Pusat Pembinaan Profesi Keuangan, Kementerian Keuangan dan Bank BUMN yang tergabung dalam Himbara;
7. Penunjukan *Signing Partner* (Partner yang bertanggung jawab) yang sama oleh Kantor Akuntan Publik paling lama dilakukan untuk periode audit 3 (tiga) Tahun Buku pelaporan secara berturut-turut, dan dalam 2 (dua) tahun berturut-turut berikutnya tidak menggunakan AP (Signing Partner) yang sama;
8. Dalam perjanjian kerja Pengadaan Jasa KAP sekurang-kurangnya dicantumkan ruang lingkup audit sesuai SE OJK Nomor 36 tahun 2017 dan *review* perhitungan pencapaian KPI Direksi baik secara kolegal maupun secara individual sesuai pasal 10 ayat (2) dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-11/MBU/II/2020 tanggal 12 November 2020; dan
9. AP, KAP dan orang dalam KAP dalam memberikan jasa wajib memenuhi kondisi independen selama periode audit dan periode penugasan profesional, yang dinyatakan dalam Surat Pernyataan dan diserahkan oleh KAP sebelum periode penugasan profesional dimulai.

Dewan Komisaris atas usulan Komite Audit telah menetapkan Kantor Akuntan Publik KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (*Ernst & Young Global Limited*) sebagai auditor yang akan mengaudit Laporan Keuangan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Tahun Buku 2023 melalui surat Dewan Komisaris Nomor 21/KOM/BTN/II/2023 tanggal 01 Februari 2023. Penunjukkan ini juga telah mendapat pengesahan dalam RUPS Tahunan Perseroan tanggal 16 Maret 2023 yang tertuang dalam Mata Acara Ketiga. Legalitas penugasan audit Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) tahun buku 2023 Perseroan telah tertuang dalam Perjanjian Kerjasama (PKS) Nomor 02/PKS/FAD/VIII/2023 tanggal 15 Agustus 2023. Profil Kantor Akuntan Publik dapat dilihat pada halaman informasi penggunaan jasa Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik.

Dalam proses penunjukkan Jasa KAP mengikuti aturan dari Otoritas Jasa Keuangan POJK Nomor 13/POJK.03.2017 yang selanjutnya pada tahun 2023 diganti dengan POJK Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan. Tata Cara Penggunaan Jasa KAP mengacu pada SE OJK Nomor 36/SEOJK.03/2017 selanjutnya pada tahun 2023 diterbitkan SE OJK Nomor 18/SEOJK.03/2023 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan. Atas ketentuan-ketentuan tersebut, Perseroan telah membatasi penggunaan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari Akuntan Publik (AP) yang sama untuk 7 (tujuh) tahun kumulatif.

Kantor Akuntan Publik, Nama Akuntan dan Fee

Tabel Kantor Akuntan Publik, Nama Akuntan dan Fee

Tahun	Kantor Akuntan Publik	Periode KAP	Nama Akuntan (Partner Penanggung Jawab)	Periode AP	Fee Jasa Audit Tahunan
2023	Purwanto, Sungkoro & Surja	Periode ke 9	Christophorus Alvin Kossim	Periode ke 1	Rp4.800.000.000
2022	Purwanto, Sungkoro & Surja	Periode ke 8	Muhammad Kurniawan	Periode ke 2	Rp4.390.000.000
2021	Purwanto, Sungkoro & Surja	Periode ke 7	Muhammad Kurniawan	Periode ke 1	Rp4.050.000.000
2020	Purwanto, Sungkoro & Surja	Periode ke 6	Yovita	Periode ke 1	Rp3.249.000.000
2019	Purwanto, Sungkoro & Surja	Periode ke 5	Muhammad Kurniawan	Periode ke 1	Rp2.650.000.000
2018	Purwanto, Sungkoro & Surja	Periode ke 4	Yasir	Periode ke 2	Rp2.367.000.000
2017	Purwanto, Sungkoro & Surja	Periode ke 3	Yasir	Periode ke 1	Rp2.290.000.000

Fee dan Jasa Lain yang Diberikan Akuntan

Selama tahun 2023, tidak terdapat jasa lain yang diberikan akuntan.

Opini Audit

Tahun	Opini Audit
2023	Wajar Tanpa Pengecualian
2022	Wajar Tanpa Pengecualian
2021	Wajar Tanpa Pengecualian
2020	Wajar Tanpa Pengecualian
2019	Wajar Tanpa Pengecualian
2018	Wajar Tanpa Pengecualian

Sistem Pengendalian Internal

Implementasi sistem pengendalian intern dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan kinerja Perseroan, meningkatkan nilai bagi *stakeholder*, meminimalisir risiko kerugian dan menjaga kepatuhan pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perseroan menerapkan sistem pengendalian intern sebagai komponen pengawasan yang penting dalam pengelolaan Perseroan dan menjadi acuan kegiatan operasional yang sehat dan terkendali. Perseroan mengacu pada COSO (*Committee of the Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*) - *Internal Control Integrated Framework* dalam menyusun kerangka kerja pengendalian intern guna memastikan kecukupan pengendalian operasional maupun finansial, pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasional, serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Tujuan Pengendalian

1. Kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan, baik peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, Regulator, maupun peraturan internal yang ditetapkan oleh Bank.
2. Tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang lengkap, akurat, tepat guna, dan tepat waktu.
3. Efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha Bank.
4. Meningkatkan efektivitas budaya risiko (*risk culture*) pada organisasi Bank secara menyeluruh.
5. Untuk meningkatkan nilai perusahaan.



Pengawasan oleh Manajemen dan Budaya Pengendalian

Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk memastikan bahwa Direksi telah memantau efektivitas pelaksanaan sistem pengendalian intern, sehingga Dewan Komisaris memiliki peran aktif untuk memastikan adanya perbaikan terhadap permasalahan Perseroan yang dapat mengurangi efektivitas sistem pengendalian intern. Direksi bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan dan strategi serta prosedur pengendalian intern. Direksi juga bertanggung jawab untuk memantau kecukupan dan efektivitas dari sistem pengendalian intern. Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab dalam meningkatkan etika kerja dan integritas yang tinggi serta menciptakan budaya organisasi yang menekankan pada seluruh pegawai Bank BTN mengenai pentingnya pengendalian intern yang berlaku di Perseroan.

Selanjutnya proses pengawasan oleh manajemen dan budaya pengendalian yang terlaksana dengan baik mendorong terciptanya Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*) yang mencerminkan keseluruhan komitmen, perilaku, kepedulian, serta langkah Dewan Komisaris dan Direksi dalam melaksanakan kegiatan pengendalian operasional Perseroan. Unsur-unsur Lingkungan Pengendalian tersebut meliputi:

1. Struktur organisasi yang memadai dan pengembangan sumber daya manusia;
2. Gaya kepemimpinan dan filosofi Manajemen Perseroan;
3. Integritas dan nilai-nilai etika serta kompetensi seluruh pegawai;
4. Kebijakan dan prosedur sumber daya manusia Perseroan;
5. Atensi dan arahan yang dilakukan oleh Direksi dan Komite lainnya seperti Komite Manajemen Risiko;
6. Cara yang ditempuh Manajemen Perseroan dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawabnya; dan
7. Faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi operasional Perseroan dan penerapan manajemen risiko.

Identifikasi dan Penilaian Risiko

Penilaian risiko merupakan serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh Direksi dalam rangka identifikasi, analisis, dan menilai risiko yang dihadapi Perseroan untuk mencapai sasaran usaha yang ditimbulkan. Risiko dapat timbul atau berubah sesuai dengan kondisi Perseroan. Perseroan harus secara terus menerus mengidentifikasi dan menilai risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian sasaran. Pengendalian internal perlu dikaji ulang secara tepat dalam hal terdapat risiko yang belum dikendalikan, baik risiko yang sebelumnya sudah ada maupun baru muncul. Pelaksanaan kaji ulang tersebut antara lain dengan melakukan evaluasi secara terus menerus mengenai pengaruh dari setiap perubahan lingkungan dan kondisi serta dampak dari pencapaian target atau efektivitas pengendalian internal dalam kegiatan operasional Perseroan.

Pengendalian Operasional, Keuangan dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan

Kegiatan Pengendalian dan Pemisahan Fungsi

Kegiatan pengendalian harus melibatkan seluruh pegawai karena merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dari setiap fungsi atau kegiatan Perseroan sehari-hari. Oleh karena itu, kegiatan pengendalian akan berjalan efektif apabila direncanakan dan diterapkan guna mengendalikan risiko yang telah diidentifikasi. Kegiatan pengendalian mencakup penetapan kebijakan dan prosedur pengendalian seperti penetapan kewenangan, otorisasi, rekonsiliasi, verifikasi, penilaian atas prestasi kerja, pembagian tugas dan pengamanan terhadap aset perusahaan.

1. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian meliputi kebijakan, prosedur dan praktik yang memberikan keyakinan pejabat dan pegawai bahwa arahan Direksi telah dilaksanakan secara efektif. Kegiatan pengendalian tersebut dapat membantu Direksi termasuk Dewan Komisaris dalam mengelola dan mengendalikan risiko yang dapat mempengaruhi kinerja atau mengakibatkan kerugian Perseroan. Kegiatan pengendalian diterapkan pada semua tingkatan fungsional sesuai dengan struktur organisasi Perseroan, yang paling sedikit meliputi:

a. Kaji Ulang Manajemen (*Top Level Reviews*)

Direksi secara berkala meminta penjelasan (informasi) dan laporan kinerja operasional harus dilaporkan oleh pejabat dan staf sehingga memungkinkan untuk mengkaji ulang hasil realisasi dibandingkan dengan target yang akan dicapai. Berdasarkan kaji ulang tersebut, Direksi dapat segera mendeteksi permasalahan seperti kelemahan pengendalian, kesalahan laporan keuangan, atau *fraud*.

b. Kaji Ulang Kinerja Operasional (*functional review*)

Kaji ulang yang dilaksanakan oleh Internal Audit Division secara periodik meliputi:

- 1) Melakukan kaji ulang terhadap penilaian risiko (laporan profil risiko) yang dihasilkan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko.
- 2) Menganalisis data operasional, baik data yang terkait risiko maupun data keuangan, yaitu melakukan verifikasi terhadap rincian dan kegiatan transaksi dibandingkan dengan *output* (laporan) yang dihasilkan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko.
- 3) Melakukan kaji ulang terhadap realisasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran, guna mengidentifikasi penyebab penyimpangan yang signifikan dan menetapkan persyaratan untuk tindakan perbaikan (*corrective actions*).

c. Pengendalian Sistem Informasi

Pengendalian Sistem Informasi dilakukan dengan melaksanakan verifikasi terhadap akurasi dan kelengkapan dari transaksi sesuai dengan ketentuan internal. Kegiatan pengendalian sistem informasi dapat digolongkan dalam 2 (dua) kriteria, yaitu:

- 1) Pengendalian umum, meliputi pengendalian terhadap operasional pusat data, sistem pengadaan dan pemeliharaan perangkat lunak, pengamanan akses, serta pengembangan dan pemeliharaan sistem aplikasi yang ada. Pengendalian umum ini diterapkan terhadap *mainframe*, *server*, dan *users workstation*, serta jaringan internal-eksternal.
- 2) Pengendalian aplikasi, diterapkan terhadap program yang digunakan Perseroan dalam mengolah transaksi dan untuk memastikan bahwa semua transaksi adalah benar, akurat, dan telah diotorisasi secara benar. Selain itu, pengendalian aplikasi harus dapat memastikan tersedianya proses audit yang efektif dan untuk mengecek kebenaran proses audit dimaksud.

d. Pengendalian Aset Fisik

Pengendalian aset fisik dilaksanakan untuk menjamin terselenggaranya pengamanan fisik terhadap aset Perseroan. Kegiatan ini meliputi pengamanan aset, catatan, dan akses terbatas terhadap program komputer dan *file data*, serta membandingkan nilai aset dan liabilitas Perseroan dengan nilai yang tercantum pada catatan pengendali, khususnya pengecekan nilai aset secara berkala.

e. Dokumentasi

Perseroan paling sedikit memformalkan dan mendokumentasikan kebijakan, prosedur, sistem dan standar akuntansi serta proses audit secara memadai. Dokumentasi tersebut harus diperbarui secara berkala guna menggambarkan kegiatan operasional Perseroan secara aktual dan harus diinformasikan kepada pejabat dan pegawai. Atas suatu permintaan, dokumen harus senantiasa tersedia untuk kepentingan auditor internal, akuntan publik, dan pengawasan Perseroan oleh Regulator. Akurasi dan ketersediaan dokumen harus dinilai oleh auditor internal ketika melakukan audit secara rutin maupun non rutin.

2. Pemisahan Fungsi

Pemisahan fungsi atau yang dikenal "*Four Eyes Principle*" dimaksudkan agar setiap orang dalam jabatannya tidak memiliki peluang untuk melakukan dan menyembunyikan kesalahan atau penyimpangan dalam pelaksanaan tugasnya pada seluruh jenjang organisasi dan seluruh langkah kegiatan operasional, melalui hal-hal sebagai berikut:

- a. Perseroan menetapkan prosedur (kewenangan) termasuk penetapan daftar petugas yang dapat mengakses suatu transaksi atau kegiatan usaha yang berisiko tinggi.
- b. Menghindari pemberian wewenang serta tanggung jawab yang dapat menimbulkan berbagai benturan kepentingan (*conflict of interest*).

Sistem Akuntansi, Informasi, dan Komunikasi

Sistem informasi dan komunikasi yaitu suatu proses penyajian laporan mengenai kegiatan operasional, finansial, serta ketaatan dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan oleh Perseroan.

1. Sistem akuntansi meliputi metode dan catatan dalam rangka mengidentifikasi, mengelompokkan, menganalisis, mengklasifikasi, mencatat atau membukukan, dan melaporkan transaksi Perseroan. Untuk menjamin data akuntansi yang akurat dan konsisten dengan data yang tersedia berdasarkan hasil olahan sistem, proses rekonsiliasi antara data akuntansi dan sistem informasi manajemen harus dilaksanakan secara berkala. Setiap penyimpangan yang terjadi harus segera diinvestigasi dan diatasi permasalahannya. Proses rekonsiliasi juga harus didokumentasikan sebagai bagian dari persyaratan proses jejak audit secara keseluruhan. Direksi akan terus berupaya memastikan integritas akuntansi dan sistem pelaporan keuangan diungkapkan tepat waktu dan akurat atas semua informasi material.
2. Sistem informasi harus dapat menghasilkan laporan mengenai kegiatan usaha, kondisi keuangan, penerapan manajemen risiko dan pemenuhan ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Sistem informasi tersebut termasuk sistem penyimpanan dan penggunaan data elektronik yang dijamin keamanannya, dipantau oleh pihak yang independen (auditor intern) dan didukung oleh program kontijensi yang memadai.
3. Sistem komunikasi harus mampu memberikan informasi kepada seluruh pihak, baik internal maupun eksternal, pemegang saham dan nasabah Perseroan.

Saat ini Perseroan sedang dalam proses pengembangan *Internal Control Over Financial Reporting* (ICOFR) sebagai upaya pengendalian internal atas pelaporan keuangan, untuk menjamin akurasi pencatatan transaksi dan mencegah/mendeteksi kesalahan/penyalahgunaan aset yang dapat berdampak material terhadap laporan keuangan. Dengan pengembangan ini diharapkan di masa yang akan datang, Perseroan memiliki kontrol internal yang memadai yang membantu Perseroan dalam aspek-aspek berikut:

1. Peningkatan kredibilitas yang diberikan untuk semua pemangku kepentingan, pemilik, pekerja, pelanggan, vendor.
2. Informasi untuk mengatur perusahaan lebih dapat diandalkan.
3. Penurunan risiko kesalahan dan ketidakteraturan.



Pengendalian Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangannya Lainnya

Dalam melaksanakan pengendalian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan Perseroan memiliki Fungsi Kepatuhan yang dijalankan oleh Compliance and Governance Division. Compliance and Governance Division memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Perseroan, memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Perseroan telah sesuai dengan ketentuan OJK, Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah serta melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan termasuk memantau dan menjaga kepatuhan Perseroan terhadap komitmen yang dibuat oleh Perseroan kepada Otoritas Jasa keuangan, Bank Indonesia, maupun otoritas pengawas lainnya yang berwenang.

Perseroan senantiasa secara konsisten melaksanakan Fungsi Kepatuhan yang merupakan serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat preventif (*ex-ante*). Upaya ini dilakukan di antaranya guna mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Perseroan; mengelola risiko kepatuhan; serta memastikan kepatuhan Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Kegiatan Pemantauan dan Tindakan Koreksi Penyimpangan

1. Kegiatan Pemantauan

- a. Perseroan harus melakukan pemantauan secara terus menerus terhadap efektivitas keseluruhan pelaksanaan pengendalian internal. Pemantauan terhadap risiko utama Perseroan harus diprioritaskan dan berfungsi sebagai bagian dari kegiatan Perseroan sehari-hari termasuk evaluasi secara berkala, baik oleh satuan kerja operasional maupun satuan kerja audit internal. Perseroan juga harus memantau dan mengevaluasi kecukupan sistem pengendalian internal secara terus menerus berkaitan dengan adanya perubahan kondisi internal dan eksternal serta harus meningkatkan kapasitas sistem pengendalian internal tersebut agar efektivitasnya dapat ditingkatkan.

- b. Langkah-langkah yang dilakukan oleh Perseroan dalam rangka terselenggaranya kegiatan pemantauan yang efektif, sekurang-kurangnya antara lain sebagai berikut:

- 1) Memastikan bahwa fungsi pemantauan telah ditetapkan secara jelas dan terstruktur dengan baik dalam organisasi Perseroan;
- 2) Menetapkan satuan kerja/pegawai yang ditugaskan untuk memantau efektivitas pengendalian internal;
- 3) Menetapkan frekuensi yang tepat untuk kegiatan pemantauan yang didasarkan pada risiko yang melekat pada Perseroan dan sifat/frekuensi perubahan yang terjadi dalam kegiatan operasional;
- 4) Mengintegrasikan sistem pengendalian internal ke dalam kegiatan operasional dan menyediakan laporan rutin yang selanjutnya direview;
- 5) Melakukan kaji ulang terhadap dokumentasi dan hasil evaluasi dari satuan kerja/pegawai yang ditugaskan untuk melakukan pemantauan; dan
- 6) Menetapkan informasi atau umpan balik (*feedback*) dalam suatu format dan frekuensi yang tepat.

2. Perbaikan Kelemahan dan Tindakan Koreksi Penyimpangan Kelemahan dalam pengendalian internal, baik yang diidentifikasi oleh satuan kerja operasional sebagai *risk taking unit*, satuan kerja manajemen risiko, satuan kerja kepatuhan, satuan kerja audit internal, maupun pihak lainnya harus segera dilaporkan kepada pihak yang berwenang. Langkah-langkah perbaikan yang harus dilakukan antara lain sebagai berikut:

- a. Setiap laporan mengenai kelemahan dalam pengendalian internal atau tidak efektifnya pengendalian risiko harus segera ditindaklanjuti pejabat yang berwenang.
- b. Untuk memastikan bahwa seluruh kelemahan segera ditindaklanjuti, pejabat berwenang harus menciptakan suatu sistem yang dapat menelusuri kelemahan pada pengendalian internal dan mengambil langkah perbaikan.
- c. Hasil identifikasi seluruh permasalahan dalam pengendalian internal harus dilaporkan ke pejabat berwenang.

Kesesuaian dengan *Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commission (COSO)*

Sistem pengendalian internal Perseroan diatur dalam Kebijakan Umum Nomor KU.7 tanggal 30 Desember 2022 sebagaimana diubah terakhir pada tanggal 17 Oktober 2023 tentang Sistem Pengendalian Intern dan telah mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 35/SEOJK.03/2017 tanggal 07 Juli 2017 tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum yang juga sejalan dengan kerangka *Internal Control Integrated Framework* yang dikembangkan oleh *The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO)*. Tujuan pengendalian internal menurut COSO meliputi tujuan operasional, tujuan pelaporan dan tujuan kepatuhan.

Dalam COSO disebutkan bahwa pengendalian intern merupakan sistem atau proses yang dijalankan oleh Dewan Komisaris, Direksi, Manajemen serta pegawai dalam sebuah perusahaan, untuk menyediakan jaminan yang memadai demi tercapainya tujuan pengendalian. COSO – *Internal Control Framework*, terdiri dari 5 (lima) komponen pengendalian yaitu:

1. Lingkungan Pengendalian (*control environment*) yang merupakan komponen fundamental dalam sistem pengendalian intern. Komponen tersebut mencerminkan nuansa dan suasana kepedulian seluruh jajaran pegawai pejabat serta pimpinan terhadap pentingnya pengendalian intern yang efektif. Lingkungan pengendalian ini sangat dipengaruhi oleh *Strong Tone at the Top*.
2. Penilaian Risiko (*risk assessment*) yang merupakan rangkaian kesadaran seluruh pegawai terhadap budaya risiko dan adanya kegiatan mengevaluasi, menilai dan memitigasi risiko.
3. Kegiatan Pengendalian (*control activities*) yang meliputi kecukupan kebijakan, ketentuan, dan prosedur serta kepatuhan dalam implementasi kegiatan operasionalnya.
4. Informasi dan Komunikasi (*information and communication*) yang merupakan kondisi saluran komunikasi efektif baik internal maupun eksternal sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.
5. Pemantauan (*Monitoring*) yang merupakan proses penilaian atas aktivitas pemantauan efektivitas rancangan dan operasi struktur pengendalian intern dan kinerja manajemen, apakah telah dilaksanakan dengan semestinya dan telah diperbaiki sesuai dengan keadaannya.

Tinjauan atas Efektivitas Sistem Pengendalian Internal

Bank BTN melalui Internal Audit Division (IAD) melakukan *Internal Control Assessment (ICA)* secara periodik dalam rangka evaluasi atas efektivitas sistem pengendalian internal. Penilaian tersebut mengukur kualitas pengendalian intern dari satuan kerja auditee atas 5 (lima) komponen pengendalian intern COSO Framework menggunakan kriteria dan metodologi rating kuesioner *Internal Control Assessment (ICA)* serta professional judgement auditor melalui pengujian langsung (*walkthrough*) di lapangan. Pada tahun 2023, Bank BTN telah menjalankan pengendalian intern sesuai dengan prinsip-prinsip pengendalian dan secara keseluruhan kualitas sistem pengendalian intern telah berjalan dengan baik.

Secara garis besar, langkah-langkah yang dilakukan Perseroan dalam rangka memastikan terselenggaranya kegiatan pemantauan yang efektif, antara lain:

1. Memastikan bahwa fungsi pemantauan telah ditetapkan secara jelas dan terstruktur dengan baik dalam organisasi Perseroan;
2. Menetapkan satuan kerja atau pegawai yang ditugaskan untuk memantau efektivitas pengendalian intern;
3. Menetapkan frekuensi yang tepat untuk kegiatan pemantauan yang didasarkan pada risiko yang melekat pada Perseroan dan sifat atau frekuensi perubahan yang terjadi dalam kegiatan operasional;
4. Mengintegrasikan Sistem Pengendalian Internal ke dalam kegiatan operasional dan menyediakan laporan rutin seperti jurnal pembukuan, *management review* dan laporan mengenai persetujuan atas eksepsi atau penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur yang ditetapkan (justifikasi atas *irregularities*) yang selanjutnya dilakukan kaji ulang;
5. Melakukan kaji ulang terhadap dokumentasi dan hasil evaluasi dari satuan kerja atau pegawai yang ditugaskan untuk melakukan pemantauan;
6. Menetapkan informasi atau umpan balik (*feedback*) dalam suatu format dan frekuensi yang tepat.

Selain itu, Perseroan juga melaksanakan Audit atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Pengendalian Internal (PSA 62) untuk memastikan kepatuhan terhadap pasal-pasal hukum, peraturan dan perjanjian kerja sama serta kepatuhan pengendalian internal yang mencakup lingkungan pengendalian, Identifikasi Risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan. Evaluasi atas efektivitas sistem pengendalian internal (*risk control*) dilakukan pada seluruh unit Kantor Pusat (divisi/desk/Regional Office) serta Kantor Cabang baik Konvensional maupun Syariah. Segala sesuatu terkait dengan permasalahan kecukupan pengendalian intern telah dilaporkan langsung kepada Direksi melalui Direktur Utama serta kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit. Upaya tindak lanjut telah dilakukan untuk meminimalkan risiko dan mengatasi permasalahan yang muncul.



Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas Kecukupan Sistem Pengendalian Internal

Direksi dan Dewan Komisaris berkomitmen untuk memastikan bahwa Tata Kelola Perusahaan dijalankan dengan baik sebagai dasar pencapaian tujuan untuk menjaga dan meningkatkan nilai Perusahaan. Salah satu implementasi Tata Kelola Perusahaan yang baik adalah memastikan bahwa sistem pengendalian intern telah dilaksanakan secara memadai.

Direksi dan Dewan Komisaris atau Komite Audit melakukan evaluasi atas efektivitas sistem pengendalian internal Perseroan yang mencakup lima komponen utama pengendalian, yaitu Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*) termasuk di dalamnya Pengawasan oleh Manajemen dan Budaya Pengendalian (*Management Oversight and Control Culture*), Identifikasi dan Penilaian Risiko (*Risk Recognition and Assessment*), Kegiatan Pengendalian dan Pemisahan Fungsi (*Control Activities and Segregation of Duties*), Sistem Akuntansi, Informasi, dan Komunikasi (*Accountancy, Information and Communication*), Kegiatan Pemantauan dan Tindakan Koreksi Penyimpangan (*Monitoring Activities and Correction Deficiencies*). Berdasarkan hasil penelaahan yang telah dilakukan pada tahun 2023, Direksi dan Dewan Komisaris menilai sistem pengendalian intern telah dilaksanakan secara memadai.

Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern ini merupakan pedoman yang memuat ukuran minimal tentang Sistem Pengendalian Intern yang wajib diselenggarakan dan diterapkan oleh Perseroan di dalam seluruh aspek-aspek yang berkaitan dengan penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan operasional Perseroan, sehingga tercipta kesamaan pemahaman dan landasan mengenai tingkat pemeliharaan kepentingan dan komitmen dari semua pihak yang terkait dengan Perseroan.

Laporan Manajemen Risiko

Dalam rangka pelaksanaan manajemen risiko dan sebagai tindak lanjut penerapan Basel II khususnya pilar 1, Perseroan telah mengimplementasikan:

1. Pengukuran Risiko Kredit dengan melakukan pemetaan eksposur risiko kredit sesuai kategori portofolio dalam perhitungan ATMR Risiko Kredit menggunakan *Standardized Approach* mengacu pada SE OJK Nomor 11/SEOJK.03/2018 tentang Perubahan atas SEOJK Nomor 42/SEOJK.03/2016 mengenai Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar. Saat ini, Perseroan telah menerapkan perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Kredit sesuai SEOJK Nomor 24/SEOJK.03/2021 tanggal 7 Oktober 2021 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan menggunakan Pendekatan Standar Bagi Bank Umum sesuai ketentuan regulator yang berlaku.

2. Penggunaan *Standardized Model* untuk risiko pasar sesuai dengan SE OJK Nomor 38/SEOJK.03/2016 tanggal 8 September 2016 perihal Pedoman Penggunaan Metode Standar dalam Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dengan Memperhitungkan Risiko Pasar dan saat ini Bank telah melakukan persiapan SEOJK Nomor 23/SEOJK.03/2022 tanggal 7 Desember 2022 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Pasar Bagi Bank Umum yang akan diterapkan mulai 1 Januari 2024 dengan melakukan uji coba perhitungan dan melaporkan kepada OJK untuk ATMR Pasar posisi bulan Juni 2023, September 2023 dan Desember 2023.
3. Perhitungan kebutuhan modal minimum dengan menggunakan perhitungan ATMR Risiko Operasional Pendekatan Standar dengan mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 06/SEOJK.03/2020 tanggal 29 April 2020 dan saat ini Perseroan melakukan pencatatan data kerugian terkait risiko operasional sesuai dengan ketentuan Regulator.

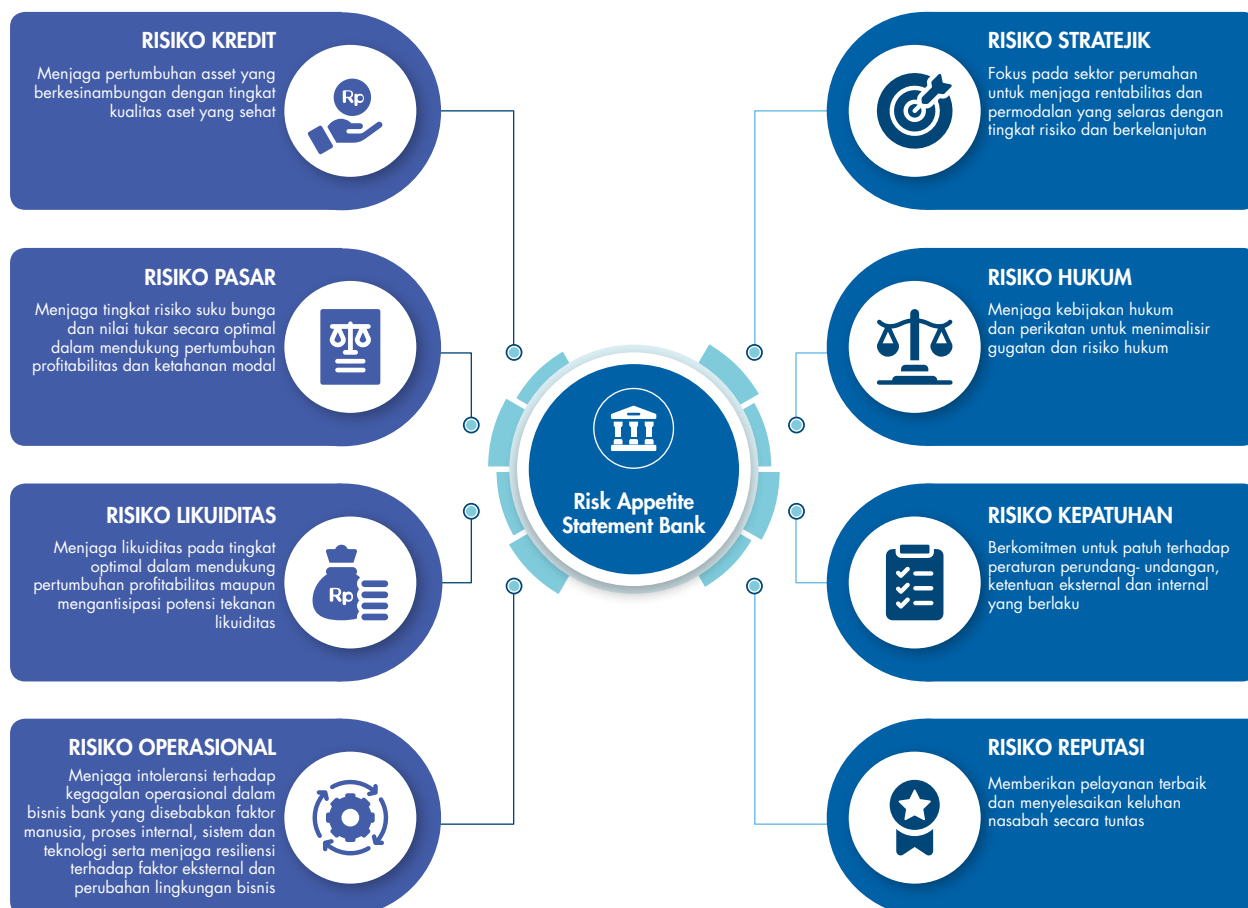
Pelaksanaan *Stress Testing* Bank terfokus pada 3 (tiga) jenis risiko yaitu risiko kredit, risiko pasar dan risiko likuiditas. Sebagai upaya dalam menyempurnakan pengukuran risiko khususnya risiko kredit, risiko pasar dan risiko likuiditas, Perseroan telah melakukan *stress test* terhadap *worst case scenario* secara berkala sebagaimana diatur dalam peraturan internal bank dengan frekuensi minimal 1 (satu) tahun sekali untuk risiko kredit serta secara triwulan untuk risiko pasar dan risiko likuiditas. *Stress testing* dilaksanakan secara berkala guna menilai kecukupan modal apabila terjadi permasalahan yang memiliki risiko ekstrim atau *catastrophy* tetapi *plausible*. Adapun *Stress Testing* Risiko Pasar dan Risiko Likuiditas telah dilakukan secara Triwulanan sedangkan *Stress Testing* Risiko Kredit, Risiko Pasar dan Risiko Likuiditas dilakukan sedikitnya sekali dalam satu tahun.

Selain itu, Perseroan juga melakukan *Stress Testing* untuk kebutuhan *update* dokumen *Recovery Plan* setiap tahun dan sebagai pelaksanaan implementasi Basel III Perseroan telah melaporkan perhitungan *Leverage Ratio* (LR) per triwulan kepada regulator sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 31/POJK.03/2019 tanggal 2 Desember 2019 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pengungkit Bagi Bank Umum, *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) bulanan kepada regulator sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 42/POJK.03/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang kewajiban pemenuhan rasio kecukupan likuiditas (*Liquidity Coverage Ratio*) bagi Bank Umum, *Net Stable Funding Ratio* (NSFR) per triwulan kepada regulator sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 50/POJK.03/2017 tanggal 13 Juli 2017 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (*Net Stable Funding Ratio*) bagi Bank Umum.

Risk Appetite Statement

Saat ini, Perseroan telah memiliki *Risk Appetite Statement* (RAS) yang merupakan pernyataan kualitatif serta ukuran kuantitatif dari risiko-risiko utama Perseroan. Pengungkapan RAS dilakukan secara tertulis dan didokumentasikan dengan baik oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko. Penetapan limit RAS dilakukan oleh Dewan Komisaris dan Direksi. Dalam penetapan RAS, telah memperhatikan keberlanjutan ekonomi, lingkungan dan sosial yang kemudian diselaraskan pada penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), *Risk Appetite*, *Risk Tolerance* dan *Recovery Plan*. Risiko yang dikuantifikasi antara lain:

Risk Appetite Statement Bank



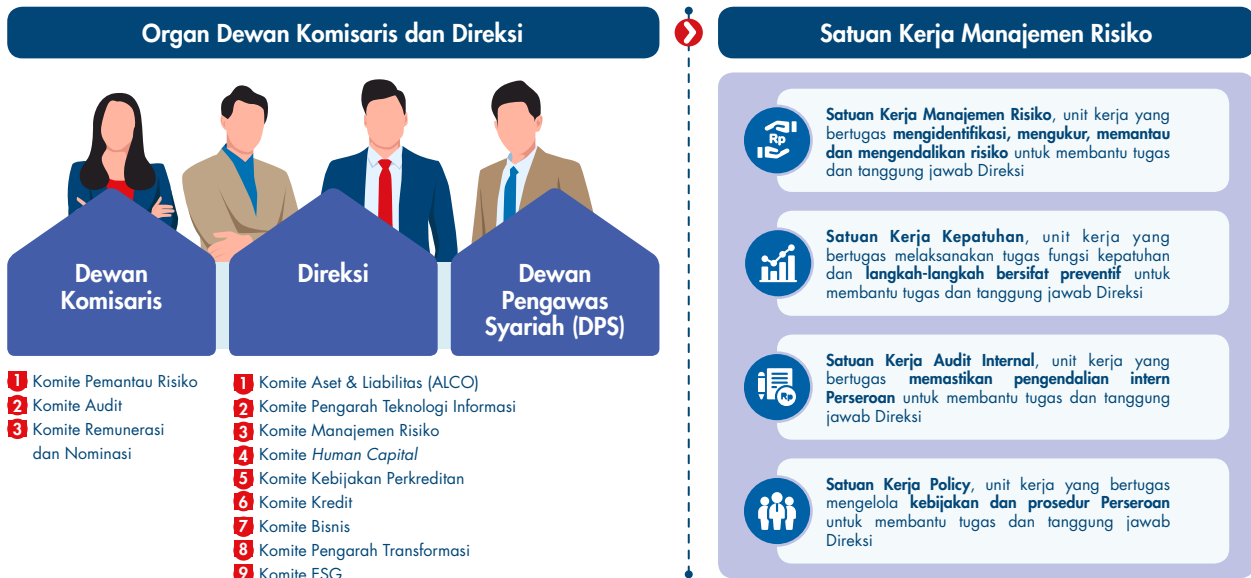
Sistem Manajemen Risiko

Dalam sistem manajemen risiko, Perseroan melaksanakan proses manajemen risiko yang didukung dengan 4 pilar penerapan manajemen risiko, yaitu:

1. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi.
2. Kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penerapan limit risiko.
3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta Sistem Informasi.
4. Sistem Pengendalian Risiko yang menyuruh.

Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Pengelolaan Manajemen Risiko dilakukan melalui pengawasan aktif oleh Dewan Komisaris dan Direksi serta Satuan Kerja Manajemen Risiko yang digambarkan dengan organisasi manajemen risiko sebagai berikut:

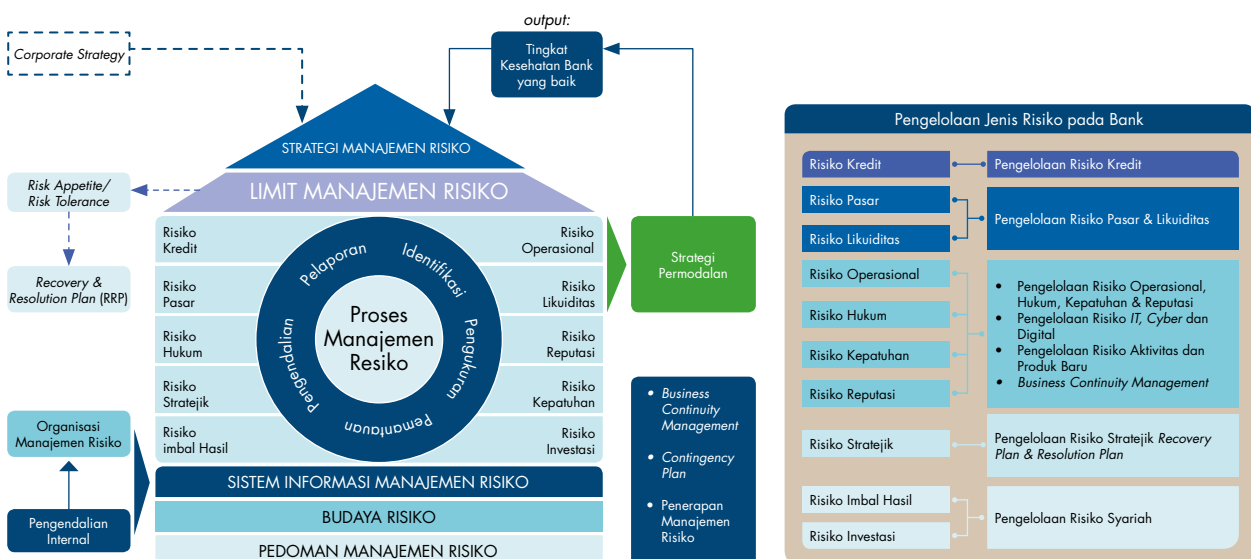


Organ Dewan Komisaris dan Direksi dibantu beberapa komite dalam menjalankan tugas dan aktivitas perbankan sesuai dengan ketentuan Regulator yang berlaku, untuk selanjutnya diteruskan kepada layer di bawah organ Dewan Komisaris dan Direksi yakni satuan Kerja Manajemen Risiko yakni Satuan Kerja Manajemen Risiko, Satuan Kerja Kepatuhan, Satuan Kerja Audit Internal dan Satuan Kerja Policy.

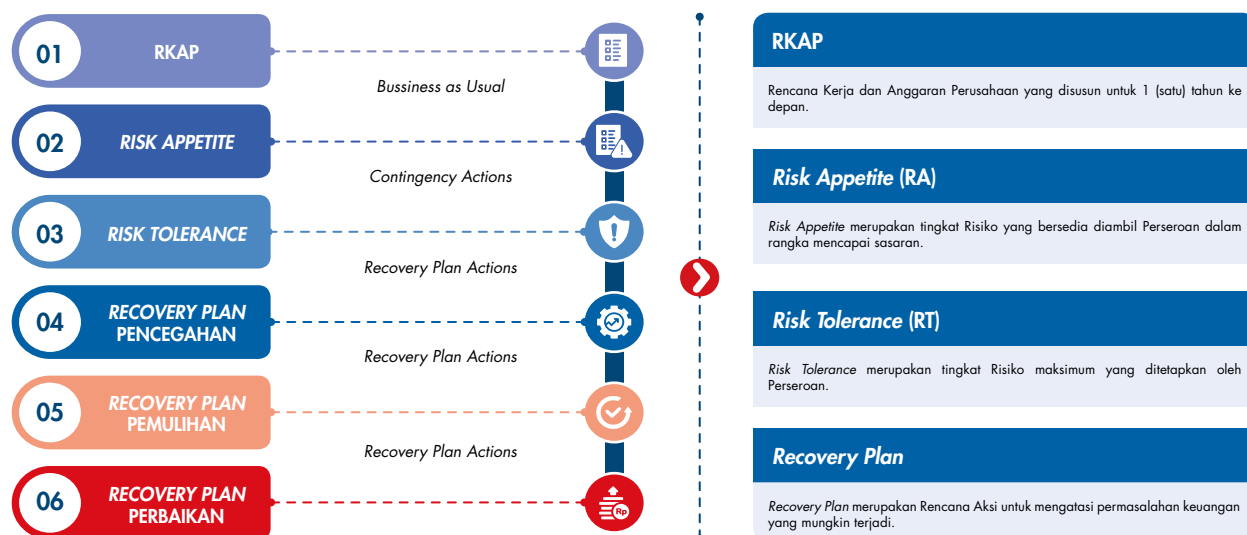
Kecukupan Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko Serta Penetapan Limit Risiko

Dalam menjalankan penerapan manajemen risiko yang sehat diperlukan kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang baik. Bank BTN saat ini melakukan transformasi arsitektur kebijakan dan prosedur sesuai hierarki piramida kebijakan yang ideal. Menindaklanjuti hal tersebut, saat ini Bank BTN telah memiliki Kebijakan Umum Manajemen Risiko sebagai Kebijakan tertinggi dalam penerapan Manajemen Risiko dengan *framework* mencakup seluruh aktivitas dalam penerapan Manajemen Risiko.

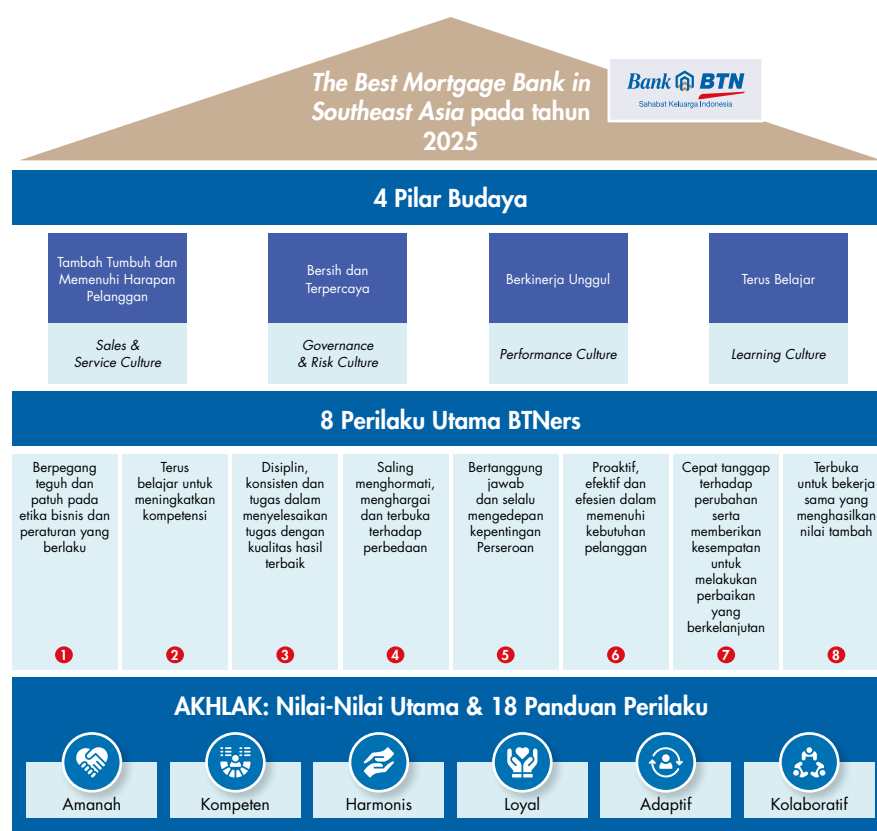
Pemetaan kebijakan umum manajemen risiko digambarkan mulai dari strategi manajemen risiko, pengelolaan risiko pada Bank dan *output* yang diharapkan adalah Tingkat Kesehatan Bank yang sehat.



Selain kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko, Perseroan juga telah melakukan serangkaian proses dalam penetapan limit risiko dirumuskan dan dijabarkan dengan mengikuti dan atau menyelaraskan dengan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan hingga *Recovery Plan* sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terkait gambaran penetapan limit adalah sebagai berikut:



Dalam penguatan kebijakan dan prosedur manajemen risiko, dalam pelaksanaannya Bank BTN juga memasukkan manajemen risiko sebagai salah satu pilar budaya perusahaan, dimana salah satu pilar budaya perusahaan adalah *Governance & Risk Culture*. Pilar *Governance & Risk Culture* merupakan pilar yang *urgent* dan *krusial* untuk diperkuat sehingga seluruh proses bisnis berjalan dengan *prudent* dan *comply*.



AKHLAK BTN

Untuk mencapai **Visi Bank BTN menjadi The Best Mortgage Bank in Southeast Asia pada tahun 2025** wajib memegang teguh 4 pilar budaya dalam menjalankan aktivitas pekerjaan di Unit Kerja masing-masing.

Pilar *Governance & Risk Culture* merupakan pilar yang *urgent* dan *krusial* untuk diperkuat sehingga seluruh proses bisnis berjalan dengan *prudent* dan *comply*.

Berdasarkan gambar di atas, untuk mendukung tujuan Bank BTN dengan berlandaskan Nilai-nilai Utama AKHLAK dan 8 (delapan) Perilaku Utama BTNers, terdapat empat pilar budaya yang menjadi pondasi utama Program Budaya Perusahaan Tahun 2023 - 2024, dengan tujuan yaitu:

1. *Sales & Service Culture* – Tambah Tumbuh dan Memenuhi Harapan Pelanggan
Pencapaian *end state* yaitu meningkatkan penjualan produk *funding*, *lending* dan *digital* serta meningkatkan kualitas pelayanan untuk mendorong bisnis dan kinerja Bank BTN.
2. *Risk & Governance Culture* – Bersih dan Terpercaya
Membangun kesadaran dan pemahaman akan risiko berikut mitigasinya dan menerapkan prinsip - prinsip manajemen risiko secara konsisten dan menyeluruh.
3. *Performance Culture* – Berkinerja Unggul
Upaya peningkatan kinerja untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.
4. *Learning Culture* – Terus Belajar
Membangun semangat belajar dan meningkatkan kompetensi kritikal seperti kompetensi *Sales*, *Digital Analytics*, *Risk & Collection* serta penguatan pemahaman BTNers atas pentingnya budaya dan penerapan AKHLAK dalam keseharian.

Dengan menggunakan 4 pilar tersebut, penerapan program budaya perusahaan Bank BTN diharapkan dapat mendorong tercapainya Visi Bank BTN.

Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko Serta Sistem Informasi

Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko dilakukan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko dalam hal ini ERMD memiliki Departemen yang terdapat unit kerja *assessment* untuk mengidentifikasi dan mengukur masing-masing risiko. Pemantauan dan pengendalian risiko dilakukan secara berkala untuk memitigasi risiko yang signifikan terhadap Perseroan, dalam hal ini ERMD memiliki Departemen yang terdapat unit kerja *Risk Development* yang salah satu fungsinya adalah melakukan pengendalian risiko atas kebijakan-kebijakan yang akan diterbitkan Perseroan agar terminimalisir risiko yang akan dihadapi Perseroan. Identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko merupakan bagian utama dari proses penerapan manajemen risiko.

Hal-hal yang menjadi perhatian Perseroan dalam pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian dan sistem informasi manajemen risiko adalah sebagai berikut:

Identifikasi Risiko

Identifikasi risiko merupakan proses menemukan, mengenali dan merekam risiko. Tujuan dari proses identifikasi risiko adalah untuk mengidentifikasi seluruh jenis risiko yang melekat pada setiap aktivitas fungsional yang berpotensi merugikan Perseroan. Proses identifikasi risiko dilakukan dengan menganalisis seluruh sumber risiko, peristiwa risiko dan dampak risiko yang paling kurang dilakukan terhadap risiko dari produk dan aktivitas Perseroan serta memastikan bahwa risiko dari produk dan aktivitas baru telah melalui proses manajemen risiko yang layak sebelum diperkenalkan atau dijalankan. Selain itu, Perseroan mengidentifikasi risiko yang dilakukan secara berkala.

Pengukuran Risiko

Sistem pengukuran risiko digunakan untuk mengukur eksposur risiko yang melekat pada aktivitas Perseroan untuk dibandingkan dengan *risk appetite* Perseroan sehingga Perseroan dapat mengambil tindakan mitigasi risiko dan mengukur kecukupan modal Perseroan untuk mengover risiko residual. Risiko dilakukan secara berkala baik untuk produk dan portofolio maupun seluruh aktivitas bisnis Perseroan. Metode pengukuran risiko dilakukan secara kuantitatif dan/atau kualitatif. Metode pengukuran berupa metode standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan OJK dalam rangka penilaian risiko dan perhitungan modal maupun metode internal yang dikembangkan sendiri oleh Perseroan. Pemilihan metode pengukuran disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha. Sistem pengukuran risiko dievaluasi dan disempurnakan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan untuk memastikan kesesuaian asumsi, akurasi, kewajaran dan integritas data, serta prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko. *Stress test* dilakukan untuk melengkapi sistem pengukuran risiko dengan cara mengestimasi potensi kerugian Perseroan pada kondisi pasar yang tidak normal dengan menggunakan skenario tertentu guna melihat sensitivitas kinerja Perseroan terhadap perubahan faktor risiko dan mengidentifikasi pengaruh yang berdampak signifikan terhadap portofolio Perseroan. *Stress test* dilakukan secara berkala dan mereviu hasil *stress testing* tersebut serta mengambil langkah-langkah yang tepat apabila diperkirakan kondisi yang akan terjadi melebihi tingkat toleransi yang dapat diterima. Hasil tersebut digunakan sebagai masukan pada saat penetapan atau perubahan kebijakan dan *limit*.

Pemantauan Risiko

Sistem dan prosedur pemantauan mencakup pemantauan terhadap besarnya eksposur risiko, toleransi risiko, kepatuhan limit internal dan hasil *stress testing* maupun konsistensi pelaksanaan dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan. Hasil pemantauan disajikan dalam laporan berkala yang disampaikan kepada manajemen dalam rangka mitigasi risiko dan tindakan yang diperlukan. Perseroan menyiapkan sistem *back up* dan prosedur yang efektif untuk mencegah terjadinya gangguan dalam proses pemantauan risiko dan melakukan pengecekan serta penilaian kembali secara berkala terhadap sistem *back up* tersebut.

Pengendalian Risiko

Sistem pengendalian risiko Perseroan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Proses pengendalian risiko yang diterapkan disesuaikan dengan eksposur risiko maupun tingkat risiko yang akan diambil dari toleransi risiko. Pengendalian risiko dapat dilakukan, antara lain dengan cara mekanisme lindung nilai dan metode mitigasi risiko lainnya seperti penerbitan garansi, sekuritisasi aset, *credit derivatives* serta penambahan modal Perseroan untuk menyerap potensi kerugian.

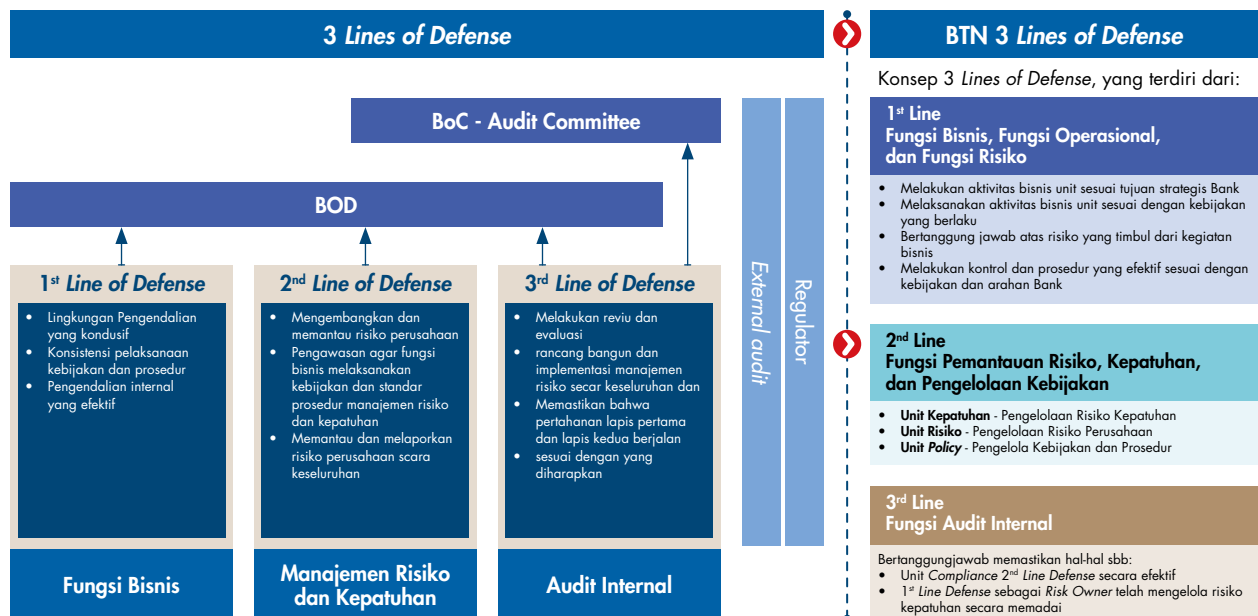
Sistem Informasi Manajemen Risiko

Sistem informasi manajemen risiko pada Perseroan dikelola secara bersama-sama oleh beberapa Divisi pada Perseroan. Pada tahap awal difokuskan pada pengumpulan dan perbaikan kualitas *database* data dan risiko yang diharapkan dapat dikembangkan dan diaplikasikan ke dalam sistem informasi manajemen risiko secara bertahap agar proses pengukuran risiko dan pemantauan risiko dapat dilakukan secara terintegrasi dan dapat disajikan secara tepat waktu serta sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku.

Sistem Pengendalian Internal

Dalam melakukan proses penerapan Manajemen Risiko yang efektif, Perseroan melengkapi sistem pengendalian internal yang bertujuan untuk menjaga aset Perseroan, menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan, serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran aspek kehati-hatian Perseroan telah melakukan peninjauan efektivitas prosedur pengendalian internal dan kerangka manajemen risiko secara periodik.

Terselenggaranya sistem pengendalian internal yang andal dan efektif menjadi tanggung jawab dari seluruh satuan kerja operasional dan satuan kerja pendukung serta Satuan Kerja Audit Internal, yang digambarkan prosesnya sebagai berikut:





Jenis Risiko dan Pengelolaannya

Dalam penerapan manajemen risiko jenis-jenis risiko yang dikelola Perseroan antara lain:

Risiko Kredit

Risiko Kredit adalah risiko kerugian akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajibannya. Termasuk dalam Risiko Kredit yaitu Risiko Kredit akibat kegagalan debitur dalam memenuhi kewajibannya, Risiko Kredit akibat terkonsentrasinya penyediaan dana (Risiko Konsentrasi Kredit), Risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty credit risk*), Risiko Kredit akibat kegagalan *settlement* (*settlement risk*), dan Risiko Kredit akibat *country risk*.

Risiko Kredit dapat bersumber dari berbagai aktivitas bisnis Perseroan. Pada sebagian besar pemberian kredit merupakan sumber Risiko Kredit yang terbesar. Selain kredit, Perseroan menghadapi Risiko Kredit dari berbagai instrumen keuangan seperti surat berharga, akseptasi, transaksi antar bank, transaksi pembiayaan perdagangan, transaksi nilai tukar dan derivatif serta kewajiban komitmen dan kontingensi.

Pengelolaan Risiko Kredit

Sebagai bagian dari pengelolaan risiko kredit, Perseroan secara teratur meninjau dan memperbarui Pedoman Kebijakan Kredit dan Pembiayaan sebagai bagian dari proses penilaian risiko. Eksposur Risiko Kredit dipantau sejak proses pemberian kredit sampai dengan jatuh tempo kredit. Pemantauan dan pengendalian risiko kredit di antaranya dengan mengevaluasi eksposur risiko kredit terhadap limit risiko kredit (*Risk Appetite & Risk Tolerance*), Bank sedang melakukan *re-modeling Internal Credit Rating* (ICR) untuk kredit komersial dalam rangka melakukan *review* terhadap ICR agar dapat digunakan secara lebih akurat.

Bank saat ini sudah mengimplementasikan *Commercial Banking Center* (CBC) di mana CBC berfungsi sebagai sentralisasi pemrosesan kredit komersial. Terhadap proses pengambilan keputusan pemberian kredit komersial, Perseroan juga melakukan pembentukan komite kredit melalui Rapat Komite Kredit. Selain itu telah dibentuk Departemen *Monitoring* pada *Commercial Banking Division* yang khusus memonitor eksposur kredit debitur-debitur besar (50 debitur inti) serta sudah diimplementasikan *Intelligence Credit Monitoring* (iCremo) yakni aplikasi untuk kredit



komersial yang berfungsi untuk melakukan proses *monitoring* kredit komersial mencakup tiga pilar (Manajemen, Prospek Usaha dan Agunan). Selain itu, Bank juga sedang melakukan implementasi Sentra Proses UMKM (SPU) sebagai upaya melakukan perbaikan proses dan pengelolaan kredit UMKM (SME) untuk meningkatkan produktivitas, perbaikan kualitas putusan kredit yang tersentral dan objektif, serta *monitoring* yang tersentralisasi. Dalam mendukung penguatan manajemen risiko kredit komersial dan SME, Satuan Kerja Manajemen Risiko melakukan pengembangan sistem seperti *Credit Scoring Model* SME dan *Early Warning System* untuk kredit Komersial dan Korporasi.

Pada kredit konsumen, proses pengendalian risiko kredit dilakukan melalui sistem iLoan Konsumer yang dilengkapi dengan *Credit Scoring Model* (CSM) dimana saat ini sedang dilakukan pengembangan pada CSM. Pengelolaan debitur kredit konsumen Kol-2 dan NPL dilakukan oleh Satuan Kerja *Consumer Collection and Remedial* sedangkan untuk kredit komersial dilakukan oleh Satuan Kerja *Commercial Asset Management*.

Sebagai tindak lanjut penerapan Pilar 1 Basel II, pada tahun 2023 Perseroan mengimplementasikan pengukuran risiko kredit dengan menggunakan *Standardized Approach* SE OJK Nomor 24/SEOJK.03/2021 tanggal 7 Oktober 2021 perihal Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Kredit dengan menggunakan Pendekatan Standar bagi Bank Umum.

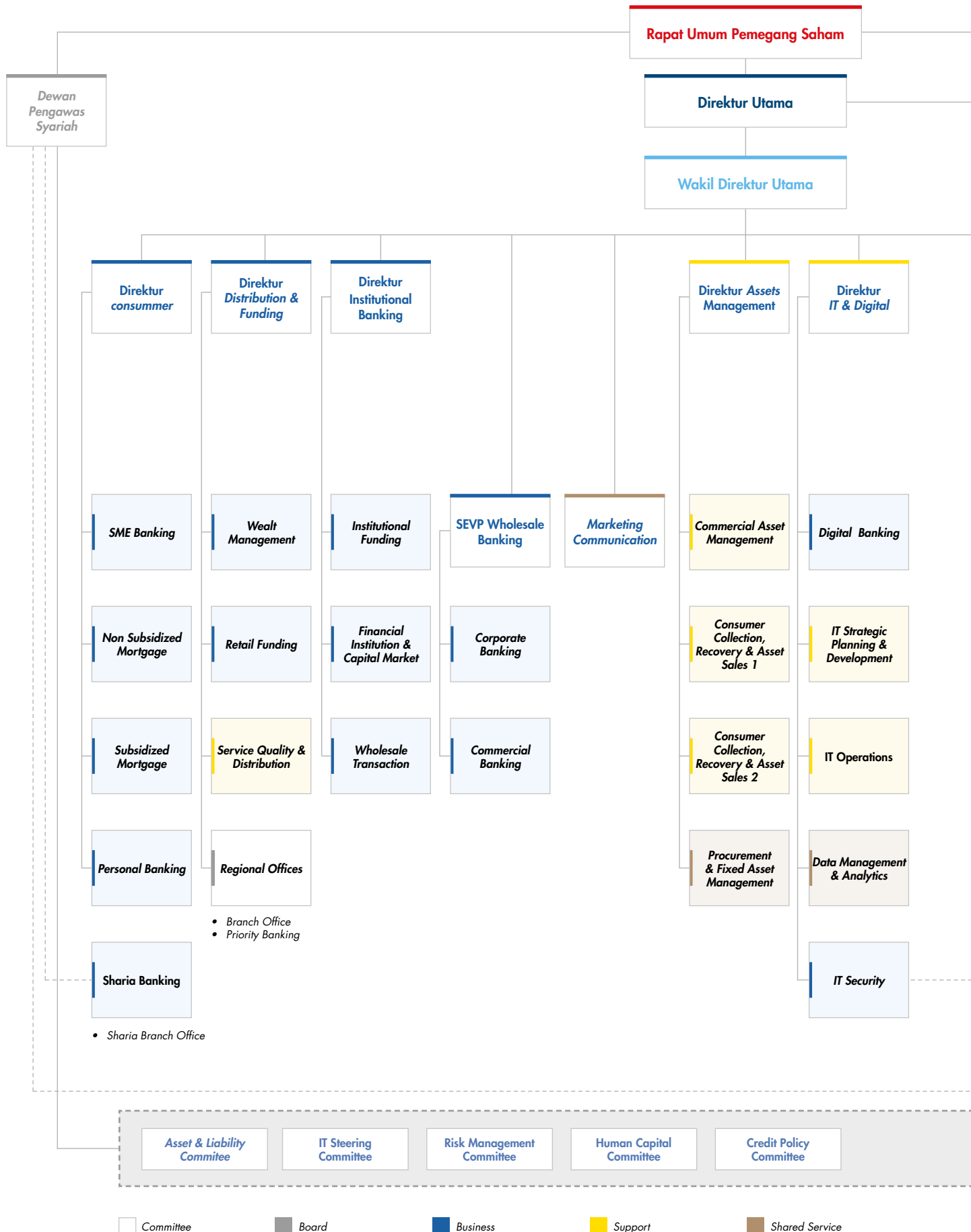
Dalam rangka mengelola risiko kredit, Perseroan telah menerapkan *Four Eyes Principle* dengan memisahkan fungsi risiko kredit dan unit bisnis. Dalam putusan kredit komersial terdiri dari *Commercial Risk* dan Unit Bisnis selaku *Risk Taking Unit* dan *first line* serta putusan kredit konsumen yang terdiri dari Retail Risk Division (*Regional Loan Processing Center*) dan Kantor Cabang maupun Kantor Wilayah.

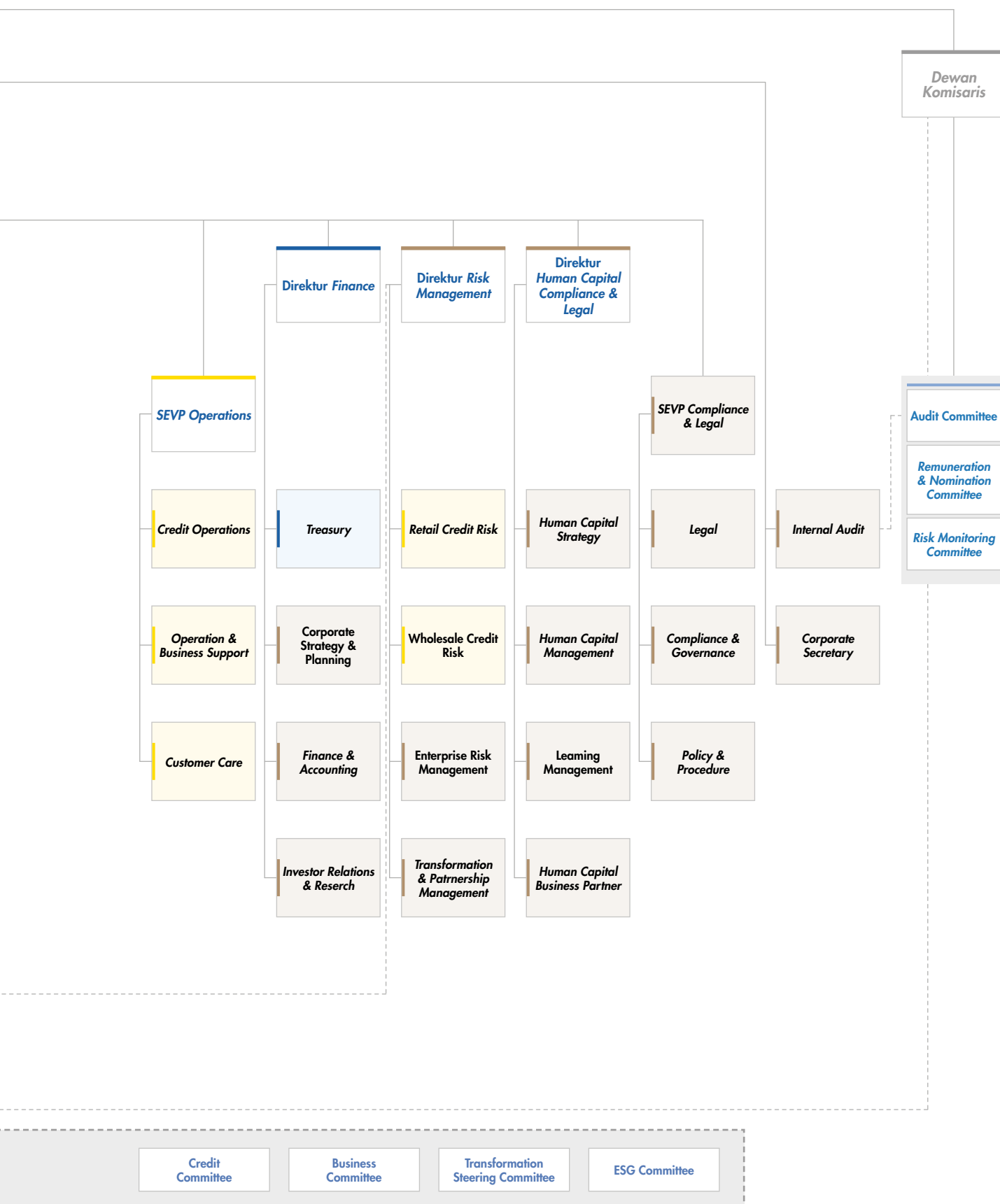
Hal ini juga dapat digambarkan dengan struktur organisasi Perseroan yang telah memisahkan fungsi *credit risk* dan *risk taking unit* sebagai berikut:





Tata Kelola
Perusahaan





— Garis komando

- - - Garis koordinasi



Risiko Pasar

Risiko Pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga *option*. Risiko Pasar meliputi antara lain risiko suku bunga, risiko nilai tukar, risiko ekuitas, dan risiko komoditas yang dapat merugikan Perseroan. Risiko Pasar dapat berasal baik dari posisi *trading book* maupun posisi *banking book*.

Pengelolaan Risiko Pasar

Sebagai bagian dari pengelolaan risiko pasar, Perseroan melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko pasar yang dilakukan oleh unit bisnis dan/atau Satuan Kerja Manajemen Risiko. Identifikasi risiko pasar salah satunya dilakukan untuk setiap produk atau aktivitas yang termasuk dalam kategori produk atau aktivitas baru. Terkait dengan pengelolaan risiko pasar, Perseroan telah memiliki Komite Manajemen Aset dan Kewajiban (*Assets and Liabilities Committee* atau ALCO) di mana secara berkala membahas antara lain suku bunga dan pengelolaan risiko pasar pada Perseroan, terutama yang bersumber dari posisi *banking book*.

Dalam rangka mengukur risiko suku bunga dalam posisi *trading book* dan *banking book*, Perseroan melakukan analisis sensitivitas yang ditujukan untuk mengukur dampak dari perubahan suku bunga pasar terhadap laba (rugi) dan ekuitas bank. Sedangkan dalam rangka mengukur risiko nilai tukar, Perseroan melakukan analisis sensitivitas yang ditujukan untuk mengukur dampak perubahan nilai tukar terhadap laba (rugi) Perseroan. Khusus untuk posisi *banking book*, Perseroan melakukan pengukuran risiko suku bunga dalam *banking book* dengan metode *repricing gap* sebagaimana tertuang SE Direksi Nomor 22/SE/DIR/ERMD/2021 tanggal 29 September 2021 perihal Manajemen Risiko Suku Bunga dalam *Banking Book* dan SK Direksi Nomor 27/SK/DIR/ERMD/2021 tanggal 29 September 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Risiko Suku Bunga pada *Banking Book*. Sesuai Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.03/2018 tanggal 21 Agustus 2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko dan Pengukuran Risiko Pendekatan Standar untuk Risiko Suku Bunga dalam *Banking Book* (*Interest Rate Risk in The Banking Book* atau IRRB) bagi Bank Umum, Perseroan telah menyampaikan penyesuaian kebijakan terkait IRRBB dan laporan perhitungan IRRBB sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam rangka pelaksanaan pengukuran risiko suku bunga dalam *banking book* tersebut, Perseroan telah menyusun kebijakan IRRBB dan telah mengembangkan sistem/aplikasi pengukuran IRRBB.

Sebagai upaya guna melengkapi pengukuran risiko pasar dengan metode standar dan analisis sensitivitas, Perseroan melakukan *stress testing* guna menilai ketahanan Perseroan dalam menghadapi perubahan suku bunga dan nilai tukar yang ekstrem, dengan skenario mengacu pada ketentuan regulator dan skenario internal bank. Untuk skenario internal bank, setiap awal tahun Satuan Kerja Manajemen Risiko berkoordinasi dengan *Working Group Stress Testing* (Divisi terkait) merumuskan skenario dan asumsi yang akan digunakan dalam pelaksanaan *Stress Testing* Risiko Pasar selama 1 (satu) tahun ke depan.

Pemantauan dan pengendalian risiko pasar di antaranya dengan mengevaluasi eksposur risiko pasar terhadap limit internal Perseroan (*Risk Appetite & Risk Tolerance*) yang telah ditetapkan dan direviu secara berkala agar selaras dengan kondisi Perseroan. Selain itu, dalam rangka mengendalikan atau membatasi eksposur risiko nilai tukar, Perseroan telah menetapkan limit yang mencakup limit transaksi *treasury*, limit *dealer*, *budget loss limit*, *stop loss/stop gain limit*, serta batasan Posisi Devisa Neto (PDN) yang sesuai dengan batasan maksimal yang ditentukan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/5/PBI/2015 tanggal 29 Mei 2015 tentang Perubahan Keempat atas PBI Nomor 5/13/PBI/2003 tentang Posisi Devisa Neto Bank Umum. Perseroan memiliki unit *Market Middle Office* di Satuan Kerja Manajemen Risiko dalam melaksanakan pemantauan dan pengendalian risiko pasar, termasuk *monitoring* atas limit-limit yang telah ditetapkan.

Sebagai tindak lanjut penerapan Basel II Pilar 1, Perseroan telah mengimplementasikan pengukuran risiko pasar dengan menggunakan *Standardized Model* sesuai dengan SE OJK Nomor 38/SEOJK.03/2016 tanggal 15 September 2016 perihal Pedoman Penggunaan Metode Standar dalam Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dengan Memperhitungkan Risiko Pasar. Portofolio yang diperhitungkan dalam penentuan KPMR risiko pasar terdiri dari portofolio *trading book* untuk risiko suku bunga serta portofolio *trading book* dan *banking book* untuk risiko nilai tukar. Pada tahun 2023 Bank telah melakukan persiapan SEOJK Nomor 23/SEOJK.03/2022 tanggal 7 Desember 2022 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Pasar Bagi Bank Umum yang akan diterapkan mulai 1 Januari 2024 dengan melakukan uji coba perhitungan dan melaporkan kepada OJK untuk ATMR Pasar posisi bulan Juni 2023, September 2023 dan Desember 2023.

Untuk implementasi Basel II khususnya Pilar 2, Perseroan telah menyampaikan hasil laporan penerapan manajemen risiko untuk *Interest Rate in the Banking Book* (IRRBB) dan laporan perhitungan IRRBB kepada regulator secara triwulan sesuai SE OJK Nomor 12/SEOJK.03/2018 tanggal 21 Agustus 2018 perihal Penerapan Manajemen Risiko dan Pengukuran Risiko Pendekatan Standar untuk Risiko Suku Bunga dalam *Banking Book* (*Interest Rate Risk in The Banking Book*) bagi Bank Umum.

Untuk implementasi Basel III Perseroan telah melakukan tindak lanjut sebagai berikut:

1. Menyampaikan hasil laporan *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) kepada regulator secara *daring* setiap bulan melalui Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO) dan situs web Perseroan setiap triwulan sesuai POJK Nomor 42/POJK.03/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (*Liquidity Coverage Ratio*) Bagi Bank Umum.
2. Menyampaikan hasil laporan *Net Stable Funding Ratio* (NSFR) kepada regulator secara *daring* setiap triwulan melalui Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO) dan situs web Perseroan sesuai POJK No. 50/POJK.03/2017 tanggal 13 Juli 2017 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (*Net Stable Funding Ratio*) Bagi Bank Umum.

Risiko Likuiditas

Risiko Likuiditas adalah Risiko akibat ketidakmampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Perseroan.

Ketidakmampuan memperoleh sumber pendanaan arus kas sehingga menimbulkan Risiko Likuiditas dapat disebabkan antara lain oleh:

1. Ketidakmampuan menghasilkan arus kas yang berasal dari aset produktif maupun yang berasal dari penjualan aset termasuk aset likuid; dan/atau
2. Ketidakmampuan menghasilkan arus kas yang berasal dari penghimpunan dana, transaksi antar bank, dan pinjaman yang diterima.

Pengelolaan Risiko Likuiditas

Sebagai pedoman dalam melakukan pengelolaan risiko likuiditas, Perseroan memiliki Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko Likuiditas, yang merupakan bagian dari Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko. Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko Likuiditas mengatur antara lain pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi dalam penerapan manajemen risiko likuiditas, proses manajemen risiko likuiditas, serta kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko likuiditas. Perseroan memiliki Komite Manajemen Aset dan Kewajiban (*Assets and Liabilities Committee* atau ALCO) yang berfungsi melakukan pengelolaan likuiditas dan secara berkala membahas pengelolaan risiko likuiditas pada Perseroan.

Mengacu kepada Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko Likuiditas, Perseroan melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko likuiditas. Identifikasi risiko likuiditas pada dasarnya ditujukan untuk mengetahui jumlah dan trend kebutuhan likuiditas serta sumber pendanaan yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan.

Pengukuran risiko likuiditas pada Perseroan dilakukan oleh Satuan Kerja *Treasury* dan Satuan Kerja Manajemen Risiko. Dalam melakukan pengukuran risiko likuiditas mengacu pada Petunjuk Teknis No. PT.8-F.4 tanggal 18 Agustus 2023 perihal Pelaksanaan Manajemen Risiko Likuiditas. Pengukuran risiko likuiditas menggunakan 4 (empat) metode, yaitu *stock-based*, analisis profil maturitas, proyeksi arus kas dan *stress testing*. Metode *stock-based* digunakan untuk mengukur risiko likuiditas pada Perseroan dengan menggunakan rasio-rasio likuiditas, metode analisis profil maturitas digunakan untuk mengukur *gap* likuiditas dan proyeksi arus kas digunakan untuk mengukur jumlah maupun trend kebutuhan likuiditas. Perseroan melakukan *stress testing* menggunakan skenario *Bank Specific Crisis* (BSC) maupun *General Market Crisis* (GMC) *stress testing*, yang tujuannya mengukur kecukupan aset likuid yang tersedia dan kemampuan Perseroan memenuhi kebutuhan likuiditas pada kondisi krisis. Satuan Kerja Manajemen Risiko berkoordinasi dengan *Stress Testing Working Group* (Divisi terkait) merumuskan dampak risiko terhadap skenario dan asumsi yang akan digunakan dalam pelaksanaan *Stress Testing* Risiko Likuiditas selama 1 (satu) tahun ke depan.

Dalam rangka menjaga ketersediaan dan kecukupan aset likuid serta mengendalikan atau membatasi eksposur agar tidak terdampak risiko likuiditas, Perseroan melakukan pemantauan risiko likuiditas secara berkala baik harian, mingguan, bulanan maupun triwulan. Pemantauan risiko likuiditas oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko yang disampaikan kepada Direksi serta evaluasi strategi disampaikan kepada Divisi terkait.

Pemantauan dan pengendalian risiko likuiditas di antaranya dengan mengevaluasi eksposur risiko likuiditas terhadap limit internal bank (*Risk Appetite & Risk Tolerance*) dan *trigger level Recovery Plan* yang telah ditetapkan. Limit tersebut direview secara berkala agar selaras dengan kondisi Perseroan. Selain itu, Perseroan melakukan pemantauan *Early Warning Indicator* (EWI) dan dilaporkan secara berkala kepada Direksi dan Unit Kerja terkait.

Sesuai POJK Nomor 14/POJK.03/2017 tanggal 4 April 2017 tentang Rencana Aksi (*Recovery Plan*) Bagi Bank Sistemik, Bank BTN telah melakukan *monitoring* indikator likuiditas, yang salah satunya dilihat dari rasio LCR dan NSFR sesuai POJK Nomor 42/POJK.03/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) bagi Bank Umum dan POJK Nomor 50/POJK.03/2017 tanggal 13 Juli 2017 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (*Net Stable Funding Ratio*).

Risiko Operasional

Risiko Operasional adalah Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Perseroan. Risiko Operasional dapat bersumber antara lain dari SDM, proses internal, sistem dan infrastruktur, serta kejadian eksternal.

Sumber-sumber Risiko tersebut dapat menyebabkan kejadian-kejadian yang berdampak negatif pada operasional Perseroan sehingga kemunculan dari jenis-jenis kejadian Risiko Operasional merupakan salah satu ukuran keberhasilan atau kegagalan Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional. Adapun jenis-jenis kejadian Risiko Operasional dapat digolongkan menjadi beberapa tipe kejadian seperti *fraud* internal, *fraud* eksternal, praktik ketenagakerjaan dan keselamatan lingkungan kerja, nasabah, produk dan praktek bisnis, kerusakan aset fisik, gangguan aktivitas bisnis dan kegagalan sistem, serta kesalahan proses dan eksekusi, termasuk *fraud* yang timbul akibat aktivitas pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.

Pengelolaan Risiko Operasional

Dalam rangka menerapkan pengelolaan manajemen risiko operasional, Perseroan telah memiliki aplikasi *Operational Risk Management Information System* (ORMIS). Aplikasi ini merupakan sistem yang terintegrasi atas beberapa *tools* pengelolaan Risiko Operasional, antara lain *Risk and Control*



Self Assessment (RCSA), *Loss Event Database* (LED), dan *Key Risk Indicator* (KRI) pada masing-masing unit kerja. Saat ini telah diimplementasikan pada Kantor Wilayah dan Kantor Cabang.

RCSA digunakan untuk melakukan proses identifikasi dan pengukuran risiko operasional yang melekat pada seluruh unit kerja. Dalam pengisian RCSA seluruh unit kerja dituntut untuk dapat mengidentifikasi dan mengukur risiko-risiko operasional yang melekat pada aktivitas sehari-hari dan berdampak pencapaian sasaran unit kerja tersebut.

LED berfungsi sebagai *operational risk data collection* atas kejadian risiko operasional di Kantor Cabang berdasarkan 7 tipe kejadian risiko sesuai ketentuan Basel II. Unit Kerja dapat mengirimkan data kerugian akibat risiko operasional (*loss event*) secara *online* setiap terdapat kejadian risiko pada Unit Kerjanya. *Output* dari LED ini adalah data akumulasi kerugian bank dalam satu bulan baik berupa *actual loss*, *nearmiss*, maupun *potential loss* untuk masing-masing *risk event*. Hasil data yang terkumpul akan diolah dan dianalisis sehingga dapat diketahui peta eksposur risiko operasional untuk masing-masing unit kerja. Peta eskposur ini menjadi acuan dalam mitigasi terjadinya kejadian serupa dengan melakukan perbaikan proses bisnis atau menambahkan bentuk mitigasi risiko lainnya.

KRI merupakan *dashboard* untuk memantau tren risiko berdasarkan indikator. KRI dapat digunakan untuk mendeteksi risiko yang bersifat *predictive* maupun bersifat *lagging* sebagai masukan untuk tindakan pencegahan atau perbaikan.

Perseroan juga telah mengimplementasikan kebijakan *Business Continuity Management* (BCM) untuk memastikan kelangsungan operasional Perseroan dalam menjalankan bisnis pasca terdampak risiko operasional yang bersumber dari faktor eksternal seperti bencana alam, konflik sosial, dan kegagalan sistem IT. Kebijakan BCM tersebut berisikan langkah-langkah sistematis dan menjadi pedoman pegawai dalam menghadapi keadaan darurat mulai dari kesiapan pra-bencana, respons terhadap bencana, rencana kontinuitas operasional, hingga pengembalian ke kondisi normal. Dalam mendukung keberhasilan penerapan BCM, Bank melakukan beberapa aktivitas antara lain:

1. Penginian peraturan internal terkait *Business Continuity Management* (BCM) secara berkala yang berisikan peran dan tanggung jawab masing-masing Unit Kerja dengan jelas.
2. Proses internalisasi kepada seluruh pegawai dengan menyusun materi sosialisasi dan pelaksanaan kuis yang dimasukkan ke dalam program budaya *Risk Awareness*
3. Melakukan *assessment* ketersediaan *Working Remote Area* (WRA) dengan melibatkan unit kerja kritikal, sehingga WRA yang dimiliki Perseroan memiliki tingkat kesiapan yang memadai untuk mendukung kegiatan operasional saat terjadi bencana.

Sebagai salah satu upaya melakukan meningkatkan fungsi pemantauan atas pengendalian risiko operasional pada aktivitas operasional di Kantor Cabang, Kantor Wilayah dan Commercial

Banking Center (CBC) telah ditempatkan petugas *Business Branch Control* (BBC), *Regional Business Control* (RBC) dan Commercial Business Center Business Control (CBCBC) yang berfungsi sebagai 1,5 *line of defence* dengan berkoordinasi dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko. Sebagai bagian dari sistem pengendalian internal untuk membangun budaya sadar risiko pada seluruh jenjang organisasi Perseroan, telah dilakukan penginian Kebijakan Umum Strategi Anti *Fraud*.

Risiko Hukum

Risiko Hukum adalah Risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Risiko Hukum dapat bersumber antara lain dari kelemahan aspek yuridis yang disebabkan oleh lemahnya perikatan yang dilakukan oleh Perseroan, ketiadaan dan/atau perubahan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan suatu transaksi yang telah dilakukan menjadi tidak sesuai dengan ketentuan, dan proses litigasi baik yang timbul dari gugatan pihak ketiga terhadap Perseroan maupun Perseroan terhadap pihak ketiga.

Pengelolaan Risiko Hukum

Identifikasi Risiko Hukum dilakukan terhadap faktor-faktor penyebab timbulnya risiko meliputi adanya tuntutan hukum dan adanya kelemahan aspek yuridis yang melekat pada aktivitas fungsional perkreditan (penyediaan dana), *treasury* dan investasi, operasional dan jasa, teknologi sistem informasi dan Sistem Informasi Manajemen, serta pengelolaan sumber daya manusia.

Pengukuran Risiko Hukum dilaksanakan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko dengan berkoordinasi dengan Satuan Kerja Hukum dan Satuan Kerja Operasional Kredit. Berdasarkan pengukuran yang dilakukan Satuan Kerja Hukum diperoleh laporan hasil evaluasi atas analisis kasus-kasus hukum secara individual terhadap kewajiban kontinjensi yang timbul dari tuntutan hukum yang terjadi, sedangkan dari Satuan Kerja Operasional Kredit diperoleh tingkat kualitas perikatan dokumen perkreditan (baik dalam kategori DAT dan LAT). Indikator atau parameter yang digunakan dalam mengukur Risiko Hukum, antara lain berupa potensi kerugian akibat tuntutan hukum, kelemahan perikatan karena tidak terpenuhinya syarat sahnya perjanjian dan terjadinya perubahan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan produk bank menjadi tidak sejalan dengan ketentuan yang ada.

Pemantauan Risiko Hukum dilaksanakan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko dengan mengevaluasi efektivitas implementasi kebijakan, prosedur dan kepatuhan terhadap kebijakan, regulasi hukum serta ketentuan limit Perseroan. Pemantauan dilaksanakan secara berkala terhadap seluruh posisi Risiko Hukum. Dalam melaksanakan pengendalian Risiko Hukum, Satuan Kerja Hukum memberi masukan hukum dan rekomendasi kepada setiap divisi dan satuan kerja serta melakukan *review* secara berkala terhadap perjanjian dan kontrak kerjasama dengan *counterparty*. Selain itu, Perseroan memiliki aplikasi *Legal Application System* (LApS) yang dirancang dalam bentuk *website* dan digunakan sebagai register serta *monitoring* terhadap kasus-kasus hukum yang terjadi

atau ditangani oleh Perseroan baik Pidana maupun Non-Pidana sehingga setiap kasus yang sedang terjadi baik di Kantor Cabang maupun di Kantor Pusat dapat dimonitor perkembangannya.

Perseroan telah menempatkan pegawai di Kantor Wilayah dan beberapa Kantor Cabang sebagai *Regional Legal Representative (RLR)* yang memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:

1. Memberi bantuan hukum terhadap permasalahan litigasi yang diajukan oleh setiap unit kerja dalam rangka pelaksanaan operasional dan memberikan bantuan hukum dalam setiap perkara hukum.
2. Mewakili Perseroan dalam pelaksanaan beracara di Pengadilan, Kepolisian, Kejaksaan, lembaga hukum lainnya, dan di luar pengadilan pada wilayah kerjanya.
3. Memberi pendapat hukum (*legal opinion*) terhadap permasalahan hukum yang diajukan oleh Kantor Wilayah, Kantor Cabang, dan Kantor Cabang Syariah terkait operasional di wilayah kerjanya.
4. Memberikan konsultasi hukum terhadap permasalahan hukum yang diajukan oleh Kantor Cabang dan Kantor Cabang Syariah.
5. Melakukan fungsi *legal watch* sesuai dengan ketentuan Regulator.
6. Mengelola dan mengendalikan risiko hukum yang berada dalam lingkup kerjanya

Risiko Strategik

Risiko Strategik adalah Risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Risiko Strategik dapat bersumber antara lain dari kelemahan dalam proses formulasi strategi dan ketidaktepatan dalam perumusan strategi, sistem informasi manajemen yang kurang memadai, hasil analisis lingkungan internal dan eksternal yang kurang memadai, penetapan tujuan strategik yang terlalu agresif, ketidaktepatan dalam implementasi strategi, dan kegagalan mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

Pengelolaan Risiko Strategik

Identifikasi Risiko Strategik dilakukan berdasarkan atas faktor-faktor Risiko Strategik pada aktivitas fungsional tertentu, seperti aktivitas perkreditan, treasury dan investasi serta operasional dan jasa melalui *business plan* yang disusun oleh Satuan Kerja *Corporate Strategy & Planning* sebagai penjabaran dari Kebijakan Umum yang ditetapkan Direksi. Selain itu, dalam pengelolaan risiko strategik juga memperhatikan risiko keberlanjutan ekonomi, keberlanjutan lingkungan dan keberlanjutan sosial termasuk mitigasi risikonya. Perseroan telah menyusun strategi, inisiatif dan roadmap keberlanjutan sampai dengan tahun 2028.

Pengukuran Risiko Strategik dilakukan berdasarkan pencapaian kinerja yaitu dengan membandingkan hasil aktual dengan target yang telah ditetapkan. Pemantauan Risiko Strategik dilakukan oleh Satuan Kerja *Corporate Strategy & Planning* secara berkala dengan memonitor pencapaian *Key Performance Indicator (KPI)* dan Satuan Kerja Manajemen Risiko yang memonitor *risk*

exposure dibandingkan dengan *risk appetite* dan *monitoring Risk Appetite* dan *Risk Tolerance* Risiko Strategik secara bulanan. Selanjutnya, Dewan Komisaris, Direksi dan Satuan Kerja mereview strategi dasar dengan fokus pada transformasi bisnis, infrastruktur dan Sumber Daya Manusia serta melakukan review *risk appetite* dan *risk tolerance* secara berkala dan minimal setahun sekali.

Selanjutnya, Satuan Kerja Manajemen Risiko melakukan pemantauan Risiko Strategik dengan membandingkan hasil yang ditargetkan (*expected results*) dengan hasil aktual, mengevaluasi kinerja unit kerja dan memastikan pencapaian target (*target objective*). Dalam pengendalian Risiko Strategik, Satuan Kerja *Corporate Strategy & Planning* berfungsi menganalisis *gap* antara laporan aktual dan target rencana bisnis dan menyampaikan langkah-langkah perbaikan yang harus dilakukan kepada Direksi secara berkala.

Risiko Kepatuhan

Risiko Kepatuhan adalah risiko akibat Perseroan tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, seperti halnya risiko kredit terkait dengan ketentuan Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM), Kualitas Aktiva Produktif, Pembentukan CKPN, Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), risiko pasar terkait dengan ketentuan Posisi Devisa Neto (PDN), risiko strategik terkait dengan ketentuan Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT), dan risiko lain yang terkait dengan ketentuan tertentu. Risiko Kepatuhan juga dapat bersumber antara lain dari perilaku hukum yaitu perilaku atau aktivitas yang menyimpang atau melanggar dari ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan dan perilaku organisasi, yaitu perilaku atau aktivitas Perseroan yang menyimpang atau bertentangan dari standar yang berlaku secara umum.

Pengelolaan Risiko Kepatuhan

Pengelolaan risiko kepatuhan dilakukan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko dengan berkoordinasi dengan Satuan Kerja Kepatuhan (*Compliance and Governance Division atau CMGD*). Satuan Kerja Kepatuhan melakukan pemantauan atas kewajiban-kewajiban penyampaian laporan Perseroan terhadap pihak eksternal dan melakukan review ketentuan internal secara berkala dan berkelanjutan sehingga tetap relevan dengan ketentuan eksternal yang berlaku. Perseroan memiliki aplikasi internal yaitu *Compliance Regulatory & Monitoring System (CRMS)* untuk memudahkan seluruh pegawai Bank BTN dalam mengakses seluruh ketentuan eksternal dan berfungsi sebagai *reminder* kepada unit kerja untuk kewajiban penyampaian laporan kepada Regulator. Untuk meminimalisir potensi terjadinya risiko kepatuhan, Bank telah menempatkan *Regional Compliance Officer (RCO)* di Kantor Wilayah untuk melakukan evaluasi tingkat kepatuhan Kantor Cabang dalam menjalankan aktivitas operasional. Seiring dengan berlakunya undang - undang Perlindungan Data Pribadi, pada Satuan Kerja Kepatuhan telah dibentuk sub unit *Data Privacy* dan telah dilakukan analisa kesenjangan kesiapan Bank dalam mengimplementasikan ketentuan dimaksud. Satuan Kerja Kepatuhan melakukan pemantauan dan melaporkan Risiko kepatuhan yang terjadi kepada Direksi secara berkala. Pengukuran



Risiko Kepatuhan dilakukan terhadap potensi kerugian yang disebabkan oleh ketidakpatuhan dan ketidakmampuan Perseroan dalam memenuhi ketentuan eksternal yang berlaku. Indikator atau parameter yang digunakan dalam mengukur Risiko Kepatuhan, antara lain jenis, signifikansi, dan frekuensi pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku atau rekam jejak kepatuhan, perilaku yang mendasari pelanggaran, dan pelanggaran terhadap standar yang berlaku secara umum.

Dalam rangka pengendalian Risiko Kepatuhan, Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Kepatuhan bertugas untuk mengevaluasi efektivitas implementasi manajemen Risiko Kepatuhan dengan memantau secara berkala seluruh jenis kegiatan yang berpotensi menimbulkan Risiko Kepatuhan.

Risiko Reputasi

Risiko Reputasi adalah Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Perseroan. Risiko Reputasi dapat bersumber dari berbagai aktivitas bisnis bank sebagai berikut:

1. Kejadian-kejadian yang telah merugikan reputasi Perseroan, misalnya pengaruh reputasi dari pemilik dan perusahaan terkait, kompleksitas produk dan kerjasama bisnis, pemberitaan negatif mengenai Perseroan, pelanggaran etika bisnis, dan keluhan nasabah.
2. Hal-hal lain yang dapat menyebabkan Risiko Reputasi, misalnya kelemahan pada tata kelola, budaya perusahaan, dan praktik bisnis Perseroan.

Pengelolaan Risiko Reputasi

Seluruh pegawai termasuk manajemen unit bisnis dan aktivitas pendukung Perseroan menjadi bagian dari struktur pelaksana Manajemen Risiko untuk Risiko Reputasi mengingat reputasi merupakan hasil dari seluruh aktivitas bisnis Perseroan. Peran Manajemen Unit Bisnis adalah mengidentifikasi Risiko Reputasi yang terjadi pada bisnis atau aktivitas unit tersebut dan sebagai *first-line* dalam mencegah terjadinya Risiko Reputasi khususnya terkait hubungan dengan nasabah. Identifikasi Risiko Reputasi dilakukan pada faktor-faktor risiko yang melekat pada aktivitas fungsional tertentu seperti perkreditan (penyediaan dana), penghimpunan dana, *treasury* dan investasi, operasional dan jasa, teknologi sistem informasi dan *Management Information System (MIS)*, serta SDM.

Dalam rangka proses identifikasi risiko reputasi Perseroan memiliki aplikasi SPN (Sistem Pengaduan Nasabah) dan melakukan *monitoring* terhadap semua media massa (cetak dan elektronik lokal maupun nasional). Perseroan melakukan pencatatan setiap pemberitaan tentang Perseroan baik secara langsung (*straight news*) maupun tidak langsung (*mention*).

Aplikasi SPN terintegrasi dengan Kantor Cabang dan *Contact Center*. Satuan Kerja Pengelolaan Pengaduan Nasabah sebagai pengelola SPN menindaklanjuti pengaduan nasabah tersebut dan menyelesaikan sesuai dengan SLA yang telah ditetapkan.

Pengukuran Risiko Reputasi dilakukan berdasarkan hasil *assessment* terhadap faktor-faktor yang berpengaruh pada reputasi Perseroan antara lain keluhan nasabah dan pemberitaan negatif tentang Perseroan. Risiko Reputasi dikelola oleh Satuan Kerja *Corporate Secretary* yang mengelola pemberitaan tentang Perseroan yang dimuat di dalam media massa baik cetak maupun elektronik dan Satuan Kerja Pengelolaan Pengaduan Nasabah yang mengelola pengaduan nasabah.

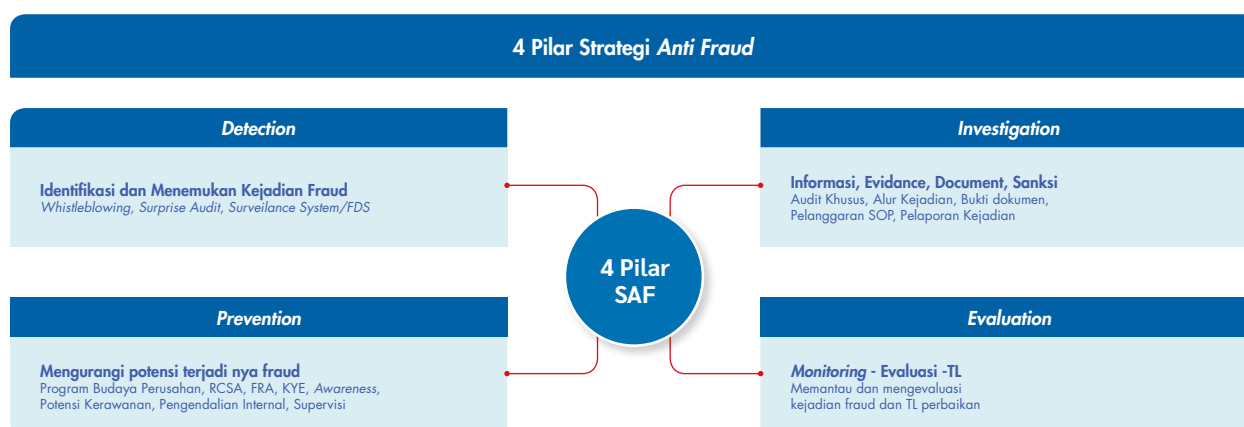
Dalam rangka pemantauan Risiko Reputasi dan memastikan terjaganya kepuasan nasabah, SPN berfungsi untuk mendukung pengelolaan layanan dan penanganan pengaduan nasabah secara *online* antar pihak yang terkait dengan permasalahan di Kantor Cabang dan Kantor Pusat. Selain itu, pemantauan Risiko Reputasi juga dilakukan oleh unit kerja Satuan Kerja Manajemen Risiko dengan mengingatkan dan memberikan rekomendasi perbaikan kepada Divisi pengelola Risiko Reputasi dari Satuan Kerja Sekretaris Perusahaan dan Satuan Kerja Pelayanan Nasabah berdasarkan asesmen pada parameter profil risiko reputasi.

Penguatan Penerapan Budaya Risiko

Penguatan penerapan budaya risiko sebagai bagian untuk menjaga komitmen dan memastikan bahwa kebijakan budaya risiko telah dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh manajemen dan pegawai maka strategi penerapan budaya risiko harus selaras dengan strategi penerapan manajemen risiko, Perseroan menetapkan *roadmap* penerapan budaya risiko per tahun sesuai dengan level tingkat kematangan yang ingin dicapai, *monitoring* penerapan budaya risiko dengan melakukan pengukuran tingkat kematangan budaya risiko minimal sekali dalam setahun oleh tim internal dan sekali dalam tiga tahun oleh tim independen (pihak eksternal). Perseroan melakukan kaji ulang kebijakan budaya risiko sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun. Beberapa program penerapan dan peningkatan budaya risiko adalah:

1. *Risk Economic Outlook* merupakan agenda rutin secara tahunan yang didalamnya membahas strategi dalam penetapan *risk appetite* dan *risk tolerance*. Forum ini adalah memberikan pemahaman *awareness risk* kepada Dewan Komisaris dan Direksi sehingga diharapkan dapat mengambil keputusan strategis yang tepat.
2. Bank secara aktif melakukan Forum *Portfolio Quality Review* dengan dihadiri Direksi, Divisi, CBC, Kantor Cabang sebagai upaya memberikan gambaran terkini mengenai posisi dan kualitas kredit baik secara *bankwide* maupun per segmentasi kredit.

3. Melakukan kunjungan dan menumbuhkan sikap *awareness* dalam rangka pelaksanaan *cleansing* data untuk meningkatkan kualitas *loss event database* di Bank BTN.
4. Menumbuhkan budaya kepatuhan, kegiatan ini dilakukan dengan pendekatan melalui penerapan setiap proses bisnis harus senantiasa berpedoman pada peraturan dan ketentuan maupun SOP internal dan eksternal yang berlaku.
5. Menerapkan preventif berkelanjutan sehingga tidak terjadi kelemahan yang signifikan pada proses pertahanan lini pertama dan membuat *action plan* perbaikan dengan berkoordinasi antara Satuan Kerja Manajemen Risiko dengan Satuan Kerja Internal Audit.
6. Penguatan pengendalian risiko operasional melalui berbagai kegiatan seperti seminar, *workshop*, *risk outlook*, dan *culture day*.
7. Bank memiliki sistem kontrol risiko operasional pada seluruh jaringan Bank. Bank telah melakukan *awareness* Penggunaan Aplikasi ORMIS sebagai bentuk penerapan manajemen risiko di seluruh jaringan kantor cabang.
8. Melakukan *risk awareness* terhadap potensi kerawanan *fraud* melalui *Fraud Risk Assessment* (FRA) di ruang lingkup seluruh Unit Kerja. Metode FRA dilakukan berdasarkan SE OJK Nomor 39/POJK.03/2019 tentang Penerapan Strategi Anti *Fraud* yang digambarkan sebagai berikut:



Penilaian Risiko

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/SEOJK.03/2016 tanggal 01 September 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, Satuan Kerja Manajemen Risiko menyampaikan laporan profil risiko ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per triwulan yang memuat tentang eksposur Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Kepatuhan, Risiko Strategik, Risiko Hukum dan Risiko Reputasi. Penilaian profil risiko meliputi penilaian terhadap Risiko Inheren dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko dalam aktivitas operasional Bank.

Secara umum, sesuai dengan penilaian secara *self assessment* Profil Risiko TW IV 2023 diupayakan berada pada tingkat *Low to Moderate*, yaitu kemungkinan kerugian yang dihadapi Bank dari risiko inheren komposit tergolong rendah (*Low to Moderate*) dengan kualitas penerapan manajemen risiko secara komposit Memadai (*Satisfactory*), dengan detail sebagai berikut:

Jenis Risiko	Peringkat Risiko Inheren	Peringkat KPMR	Peringkat Tingkat Risiko
Risiko Kredit	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low to Moderate</i>
Risiko Pasar	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low to Moderate</i>
Risiko Likuiditas	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low to Moderate</i>
Risiko Operasional	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low to Moderate</i>
Risiko Hukum	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low to Moderate</i>
Risiko Strategik	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low to Moderate</i>
Risiko Kepatuhan	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low to Moderate</i>
Risiko Reputasi	<i>Low to Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Low to Moderate</i>



Tinjauan atas Efektivitas Sistem Manajemen Risiko Emiten atau Perusahaan Publik

Penilaian Profil Risiko, baik Konvensional dan Syariah dilaksanakan secara periodik. Sepanjang tahun 2023 mencerminkan bahwa risiko-risiko yang dihadapi Perseroan (baik konvensional dan syariah) dapat dikelola dengan baik sehingga dapat mendukung pengembangan bisnis lebih lanjut. Dengan kata lain, Manajemen Risiko telah diterapkan oleh Perseroan dengan baik dan efektif. Hasil evaluasi efektivitas Manajemen Risiko Bank oleh pihak eksternal (konsultan independen) melalui *Risk Maturity Index* (RMI) berada pada peringkat **Managed** dengan kriteria memenuhi ketentuan regulasi yang berlaku terkait aktivitas manajemen risiko. Selama tahun 2023 telah dilakukan perbaikan implementasi manajemen risiko sesuai dengan rekomendasi hasil *Risk Maturity Index* (RMI) yang dilakukan oleh pihak independen agar penerapan Manajemen Risiko terus mengalami perbaikan dan terstandarisasi pada setiap unit kerja dan manajemen risiko telah menjadi bagian dari proses dan budaya kerja.

Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atau Komite Audit atas Kecukupan Sistem Manajemen Risiko

Sistem pengendalian internal yang dilakukan oleh Perseroan dinilai sudah berjalan efektif dan memadai tercermin dari efektivitas pelaksanaan fungsi-fungsi pengendalian internal, antara lain fungsi internal audit, manajemen risiko, kepatuhan, finansial dan operasional kontrol. Tata kelola risiko Perseroan yang berlandaskan Tata Kelola Perusahaan yang baik dan terlibatnya seluruh organ Perseroan dalam pengelolaan manajemen risiko. Hal ini dapat dilihat dari susunan organisasi manajemen risiko Perseroan. Dewan Komisaris melalui Komite Pemantau Risiko dan Direksi melalui Komite Manajemen Risiko bertanggung jawab untuk memastikan penerapan Manajemen Risiko telah memadai sesuai dengan karakteristik, kompleksitas dan Perseroan secara periodik. Berdasarkan hasil penelaahan yang telah dilakukan pada tahun 2023, Direksi dan Dewan Komisaris menilai bahwa sistem manajemen risiko telah dilaksanakan secara memadai.

Dewan Komisaris dan Direksi berperan aktif pada proses manajemen risiko dalam rangka memitigasi risiko Perseroan antara lain melalui pemantauan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko, meliputi tata kelola risiko, kerangka manajemen risiko, proses manajemen risiko, kecukupan sistem informasi manajemen dan SDM serta kecukupan sistem pengendalian internal. Kecukupan sistem Manajemen Risiko Perseroan antara lain didukung oleh:

Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko bertugas dan bertanggung jawab dalam memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dengan melakukan evaluasi atas pedoman kebijakan manajemen risiko Perseroan (Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Strategik, Risiko Kepatuhan dan Risiko Reputasi), melakukan evaluasi kesesuaian antara pedoman kebijakan manajemen risiko Perseroan dengan pelaksanaannya

dan melakukan pemantauan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Pemantau Risiko dibantu Satuan Kerja Manajemen Risiko sebagai sekretaris Komite Manajemen Risiko melakukan dan mengagendakan pertemuan secara berkala membahas isu-isu terkini, antara lain: Profil Risiko Triwulanan Bank, Tingkat Kesehatan Bank, *Recovery Plan* dan hal-hal yang terkait dengan manajemen risiko Perseroan termasuk ikut mereview Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko yang didalamnya terdapat *Risk Appetite* dan *Risk Tolerance*.

Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko berperan aktif dalam memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama terkait risiko yang melekat pada kebijakan yang akan ditetapkan Direksi maupun memberikan evaluasi terhadap ketentuan-ketentuan yang dinilai kurang sesuai dengan perkembangan terkini dan perlu dilakukan penyesuaian. terlibat secara aktif dalam melakukan penilaian risiko yang melekat pada setiap produk dan/atau jasa/aktivitas baru sehingga Perseroan dapat melakukan langkah-langkah mitigasi yang diperlukan dan juga melakukan evaluasi terhadap Kebijakan Umum Manajemen Risiko (KUMR).

Satuan Kerja Manajemen Risiko

Satuan Kerja Manajemen Risiko merupakan satuan kerja yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur yang membawahi fungsi Manajemen Risiko dan bersifat independen terhadap Satuan Kerja Operasional yang merupakan *risk-taking* unit, Satuan Kerja Audit Internal dan Satuan Kerja Kepatuhan.

Satuan Kerja Manajemen Risiko dipimpin oleh seorang Kepala Divisi yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur *Risk Management*. Satuan Kerja Manajemen Risiko terdiri dari *Enterprise Risk Management Division* dan *Digital & Operations Risk Management Division*.

Kebijakan dan Prosedur Pengelolaan Risiko

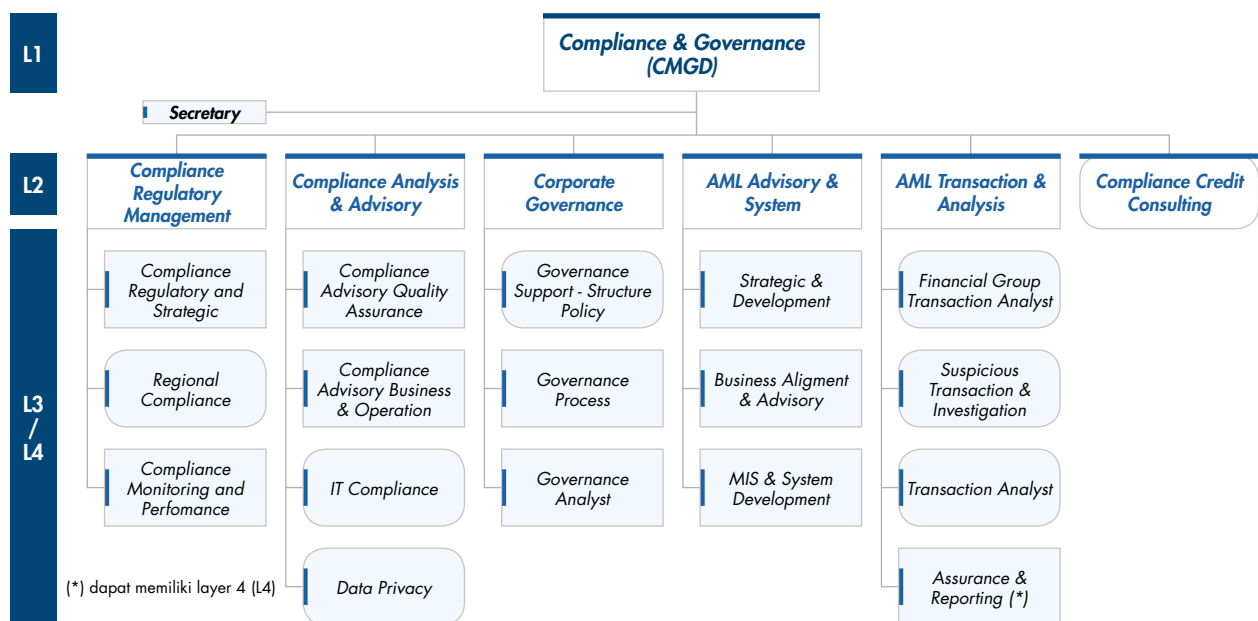
Perseroan telah memiliki panduan kebijakan di bidang manajemen risiko yaitu Kebijakan Umum Manajemen Risiko (KUMR) dimana di dalamnya telah mencakup ketentuan-ketentuan minimal yang disyaratkan oleh Peraturan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

Panduan kebijakan di bidang manajemen risiko tersebut juga telah dilengkapi dengan kebijakan-kebijakan internal turunannya yang antara lain tidak terbatas pada Petunjuk Pelaksanaan Pelaporan dan Penilaian Profil Risiko, Pelaksanaan pelaporan dan Penilaian Tingkat Kesehatan, Prosedur Validasi model Risiko, Pedoman Pelaksanaan Pengumpulan Data Risiko untuk Aplikasi *BTN-Loss Event Database* (BTN-LED Tools), Petunjuk Pelaksanaan Proses Pengukuran Risiko Likuiditas, Petunjuk Pelaksanaan Perhitungan dan Pelaporan Rasio Kecukupan Likuiditas (*Liquidity Coverage Ratio*), Petunjuk Pelaksanaan Proses Pengukuran Risiko Pasar, Manajemen Risiko Suku Bunga dalam *Banking Book*, Petunjuk Pelaksanaan *Stress Testing*, Prosedur Validasi model Risiko, Pedoman Pemantauan Likuiditas, Pedoman

Kebijakan Manajemen Risiko (PKMR), *Risk & Control Self Assessment*, Petunjuk pelaksanaan rencana aksi (*Recovery Plan*), *Risk Culture*, Pedoman dan Penilaian Profil Risiko Kantor Cabang dan Kantor Cabang Syariah, Proses *Internal Credit Rating* (ICR), Petunjuk Pelaksanaan Proses *Credit Scoring Model* (CSM), Batas Wewenang Kredit Komersial dan Kredit Konsumer, Petunjuk Pelaksanaan Perhitungan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN), Kebijakan Bagi Debitur Yang Terkena Dampak Covid-19, *Business Continuity Management* (BCM), *Standard Operating Procedure* (SOP) *Business Continuity Plan* (BCP), *Standard Operating Disaster Recovery Plan* (DRP) dan *Standard Operating Business Impact Analysis* (BIA).

Pengkajian ulang terhadap kebijakan internal juga dilakukan secara berkala agar sesuai dengan ketentuan terkini dari regulator dengan melakukan *gap analysis* serta mengakomodasi *best practices* yang lazim digunakan di industri perbankan untuk meningkatkan kualitas penerapan manajemen risiko. Sistem informasi manajemen risiko secara terus menerus difokuskan pada perbaikan kualitas *database* risiko yang diharapkan dapat dikembangkan dan diaplikasikan ke dalam sistem informasi manajemen risiko secara bertahap agar proses pengukuran risiko dan pemantauan risiko dapat dilakukan secara terintegrasi dan dapat disajikan secara tepat waktu.

Struktur Organisasi



Struktur organisasi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan ditetapkan berdasarkan Petunjuk Teknis Nomor PT.3-A.6 tanggal 14 September 2023 tentang Struktur Organisasi Kantor Pusat, Kantor wilayah, Kantor Cabang dan telah mengacu pada POJK No. 46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum serta telah diatur dalam kebijakan internal Perseroan yang terdiri atas:

1. Dewan Komisaris berperan melakukan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Perseroan.
2. Direksi berperan dalam menumbuhkan dan mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Perseroan serta memastikan terlaksananya Fungsi Kepatuhan Perseroan.

Laporan Audit Internal

Laporan Audit Intern telah dijelaskan pada Sub Bab Fungsi Audit Internal Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Fungsi Kepatuhan

Perkembangan industri perbankan semakin kompleks sejalan dengan pertumbuhan teknologi informasi globalisasi, dan integrasi pasar keuangan. Hal ini ditambah dengan ketatnya persaingan usaha antar bank menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh Perseroan sehingga diperlukan penegakan prinsip kehati-hatian serta upaya untuk memitigasi risiko kegiatan usaha Perseroan, baik yang bersifat preventif (*ex-ante*) maupun kuratif (*ex-post*). Upaya yang bersifat *ex-ante* dapat ditempuh dengan mematuhi berbagai kaidah perbankan yang berlaku untuk mengurangi atau memperkecil risiko kegiatan usaha Perseroan.

Perseroan senantiasa secara konsisten melaksanakan Fungsi Kepatuhan yang merupakan serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat preventif (*ex-ante*). Upaya ini dilakukan di antaranya guna mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Perseroan, mengelola Risiko Kepatuhan, serta memastikan kepatuhan Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

3. Direktur Kepatuhan merupakan anggota Direksi yang telah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan, untuk membawahkan Fungsi Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan pada Perseroan yang bertanggungjawab dalam merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Perseroan serta pelaksanaan tugas dalam memastikan terwujudnya Fungsi Kepatuhan Perseroan.
4. *Compliance and Governance Division* adalah Unit Kerja di Kantor Pusat yang merupakan Satuan Kerja Kepatuhan Perseroan yang bertugas dalam melaksanakan Fungsi Kepatuhan Perseroan.

Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan

Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan Perseroan dilaksanakan oleh Direktur *Human Capital, Compliance and Legal*. Proses pengangkatan, pemberhentian dan/atau pengunduran diri Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan Perseroan telah diatur dan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Pengangkatan, pemberhentian, dan/atau pengunduran diri Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan mengacu pada ketentuan mengenai pengangkatan, pemberhentian, dan/atau pengunduran diri anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Bank Umum dan telah melalui *Fit and Proper Test* sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku;
2. Dalam hal Direktur Kepatuhan untuk sementara tidak dapat menjalankan tugas jabatannya, maka pelaksanaan tugas yang bersangkutan digantikan sementara oleh Direktur lain sampai dengan Direktur Kepatuhan dapat menjalankan tugas jabatannya kembali;
3. Dalam hal Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan mengundurkan diri atau habis masa jabatannya, maka Perseroan segera mengangkat pengganti Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dan selama dalam proses penggantian Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan, ditunjuk salah satu Direktur lainnya untuk sementara melaksanakan tugas Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan;
4. Untuk memenuhi persyaratan independensi, Direktur yang melaksanakan tugas sebagai Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan, tidak dirangkap oleh Direktur Utama dan/atau Direktur yang membawahkan fungsi-fungsi yang dapat mempengaruhi independensinya.
5. Setiap penggantian jabatan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan senantiasa dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Berdasarkan keputusan RUPS Tahunan 2021 tanggal 10 Maret 2021 mengangkat Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan Perseroan yaitu Sdr. Eko Waluyo sebagai Direktur *Human Capital, Compliance and Legal*. Berdasarkan Surat Edaran OJK Nomor 39/SEOJK.03/2016 tanggal 13 September 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank, Direktur Kepatuhan

dapat menjalankan tugas Fungsi Kepatuhan setelah memperoleh persetujuan OJK sebagai Direktur Kepatuhan. Sdr. Eko Waluyo telah mengikuti Uji Kepatutan dan Kelayakan kepada OJK sebagai Direktur Kepatuhan dan sudah mendapatkan persetujuan dari OJK pada tanggal 9 Agustus 2021.

Tugas dan Tanggung Jawab Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan

Tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan dalam menjalankan fungsi Kepatuhan antara lain sebagai berikut:

1. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan.
2. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi.
3. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Perseroan.
4. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Perseroan telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah.
5. Mengelola dan meminimalkan Risiko Kepatuhan.
6. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Perseroan tidak menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk memberikan pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan termasuk memantau dan menjaga kepatuhan Perseroan terhadap komitmen yang dibuat oleh Perseroan kepada Otoritas Jasa keuangan, Bank Indonesia, maupun otoritas pengawas lainnya yang berwenang.
8. Memastikan Satuan Kerja Kepatuhan Perseroan telah efektif dalam menjalankan tugas Fungsi Kepatuhan.
9. Berkoordinasi dengan Dewan Pengawas Syariah terkait pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Unit Usaha Syariah terhadap Prinsip Syariah.
10. Bertindak sebagai koordinator atas penerapan Fungsi Kepatuhan terhadap seluruh kegiatan usaha Perseroan untuk mencapai tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

Satuan Kerja Kepatuhan

Peran Satuan Kerja Kepatuhan Perseroan sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum dijalankan oleh *Compliance and Governance Division*, sebagaimana diatur dalam Risalah Rapat Direksi Nomor 15 Tanggal 30 Mei 2022 terkait Perubahan Organisasi *Compliance and Governance Division* (CMGD) berada di bawah koordinasi Direktur yang

membawahkan Fungsi Kepatuhan serta terpisah dari unit bisnis dan operasional, unit manajemen risiko yang melakukan pengambilan keputusan pada kegiatan usaha Perseroan, unit treasury, unit keuangan dan akuntansi, unit logistik dan pengadaan barang/jasa dan unit yang mengelola teknologi informasi. Direksi memastikan Fungsi Kepatuhan tidak merangkap melaksanakan fungsi yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan.

Compliance and Governance Division dipimpin oleh Kepala Divisi (*Division Head*) yang telah memenuhi kriteria sebagai Kepala Satuan Kerja Kepatuhan sebagaimana yang diatur dalam POJK No. 46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum. Pengangkatan dan/atau pemberhentian *Compliance and Governance Division Head* selalu dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan kriteria yang telah diatur dalam kebijakan internal tentang kepatuhan yaitu sebagai berikut:

1. Memenuhi persyaratan independensi sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.
2. Menguasai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Tidak melaksanakan tugas lainnya di luar Fungsi Kepatuhan.
4. Memiliki komitmen yang tinggi untuk melaksanakan dan mengembangkan Budaya Kepatuhan.

Profil Kepala Fungsi Kepatuhan

Direksi Perseroan telah menetapkan R. Wahyu B. Witjaksono sebagai Kepala Satuan Kerja Kepatuhan Perseroan terhitung mulai tanggal 10 Desember 2018 berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 1037/DIR/2018 tanggal 10 Desember 2018. Penunjukan R. Wahyu B. Witjaksono sebagai Kepala Satuan Kerja Perseroan telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.



R. Wahyu B. Witjaksono

Kepala Satuan Kerja Kepatuhan

Warga Negara Indonesia, berusia 53 Tahun, berdomisili di Bekasi, Jawa Barat.



Riwayat Pendidikan

- Sarjana (S-1) Akuntansi dari Universitas Padjajaran, Indonesia (1993)
- Magister (S-2) Manajemen Keuangan dari Universitas Gadjah Mada, Indonesia dan University of Kentucky, Amerika Serikat (2004)



Pengalaman Kerja

- System Development Audit Dept Head, Bank BTN (2004-2007)
- Senior App Development-Business Analyst, Bank BTN (2011-2014)
- Deputy Internal Audit Division Head, Bank BTN (2018)
- Compliance and Governance Division Head, Bank BTN (Desember 2018-sekarang)



Dasar Hukum Pengangkatan

Surat Keputusan Direksi No. 1037/DIR/2018 tanggal 10 Desember 2018. Penunjukan R. Wahyu B. Witjaksono sebagai Kepala Satuan Kerja Kepatuhan.



Sertifikasi

- *Refreshment* Sertifikasi Manajemen Risiko perbankan Level 4 tanggal 9 April 2022
- B20 Indonesia *Integrity and Compliance Task Force Conference: Fostering Agility to Combat Money Laundering and Economic Crime Organized by ICAW*, 28 September 2022

Tugas dan Tanggung Jawab Fungsi Kepatuhan

Tugas dan tanggung jawab *Compliance and Governance Division* dalam menjalankan fungsi Kepatuhan antara lain sebagai berikut:

1. Membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Perseroan pada setiap jenjang organisasi.
2. Berkoordinasi dengan Unit lain dalam melakukan identifikasi, pengukuran, *monitoring*, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.
3. Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Perseroan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Melakukan review dan/atau merekomendasikan pengujian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Perseroan agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah.

5. Melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Perseroan telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan antara lain:
 - a. Memastikan kepatuhan Perseroan terhadap komitmen yang dibuat kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang;
 - b. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai mengenai hal-hal yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan terutama mengenai ketentuan regulator yang berlaku;
 - c. Bertindak sebagai *contact person* untuk permasalahan kepatuhan Perseroan bagi pihak internal maupun eksternal.
 - d. Memastikan proses bisnis pada Satuan Kerja Kepatuhan telah sesuai dengan standar sertifikasi ISO 9001:2015.
 - e. Memastikan pelaksanaan dan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) tata kelola perusahaan berdasarkan

regulasi dari OJK di Entitas utama, Perusahaan Anak, Unit Sharia di lingkungan usaha Bank BTN untuk memastikan kualitas proses perusahaan.

- f. Memastikan pelaksanaan penilaian (*assessment*) tata kelola perusahaan oleh pihak ketiga/independen dalam rangka mencapai tujuan perusahaan.
- g. Memastikan Pengelolaan Operasional dan Pelaporan terkait Penerapan Program APU dan PPT di Kantor Pusat.

Pengembangan Kompetensi Fungsi Kepatuhan

Perseroan melakukan program pengembangan pegawai fungsi kepatuhan untuk memenuhi kompetensi dan keahlian yang dibutuhkan secara berkesinambungan dengan metode pendidikan maupun pelatihan. Setiap pegawai mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengikuti program pengembangan ini yang disesuaikan dengan kebutuhan kompetensi dasar dan kompetensi teknis jabatan. Adapun kompetensi yang telah diikuti oleh pegawai fungsi kepatuhan antara lain:

Jenis Pelatihan dan Pendidikan	Jumlah Peserta
<i>Classroom / Virtual Classroom</i>	
BTN Leadership Forum 2023	1
BTN Millenial Leaders 2023	1
Data Analytic dan Penyajian Data	2
Digital Talent ForDigi	2
Global GRC Benchmarking Series5 - Europe	1
Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan	9
Impactful Presentation Skill	3
Internal Workshop Pembekalan Audit 2023	1
MOOC LinkedIn Learning 2023	3
Pelatihan ESG Implementation	4
Pelatihan Pendalaman ASEAN CG Scorecard	6
Practical Microsoft Excel	2
Program Pengembangan Talent (Leadership)	2
Program Pengembangan Talent (Technical)	2
Sertifikasi API Muda KPK Tahun 2023	18
Webinar - Meningkatkan Kolaborasi Bank	8
Webinar - Pemanfaatan Analisis Big Data	1
Webinar Anti Money Laundering in Digital	1
Webinar APU PPT "Kewaspadaan Modus TPPU"	19
Webinar II APU dan PPT Tahun 2023	19
Webinar Leadership - The Future of Compe	3
Webinar OJK - Strategi Pencegahan Gratif	7
Webinar OJK - UU P2SK Sektor Perbankan	1

Jenis Pelatihan dan Pendidikan	Jumlah Peserta
Workshop ESG Bank BTN	1
Workshop Team HCCL 2023	8
Optimize Selling for Consumer Staff	1
Refreshment Materi LHPK Sistem Pembayaran	1
Leading with Impact: Strengthening Your	1
Pendidikan General Banking Staff	1
Presentation Design & Data Visualization	1
Pelatihan Project Management	4
Pelatihan Communication Skill	4
Penerapan Program APU PPT & PPPSPM 2023	2
Pelatihan Greenship Associate	3
Branch Visit Evaluasi Budaya Kepatuhan	3
Internalisasi APU PPT & PPPSPM	3
Workshop Corporate Governance (IICG)	3
Seminar Dana Pensiun	1
Supervisory Development Program (Onsite)	1
Sertifikasi Ahli Pembangun Integritas	4
Pelatihan HCBP-The Cycle of HC Practices	1
Workshop Pencegahan & Penanganan Cyber	5
Pelatihan COBIT 2019 & Certified 2023	1
Pelatihan ITIL V4 & Certified Exam	1
Pelatihan Penanganan Aset Virtual	2
Certified Anti-Fraud & Legal (CAFP)	1
Webinar Aplikasi Blockchain Dunia Bank	2

Jenis Pelatihan dan Pendidikan	Jumlah Peserta
Pelatihan Operasional Series	1
Webinar - <i>Implementation of Data Protection</i>	3
Webinar <i>Security Awareness Cyber Crime</i>	3
<i>Refreshment</i> Sertifikasi Manajemen Risiko	7
Webinar OJK <i>Leadership in Changin Atmosphere</i>	3
Sosialisasi Penanggulangan Terorisme	15
Webinar OJK - <i>Internet of Things (IoT)</i>	4
<i>Supervisory Development Program (Online)</i>	1
Workshop Ketentuan POJK Nomor 8 2023	20
Indonesia <i>Privacy and Security Summit</i>	2
Online / Self Learning	
Webinar II APU dan PPT Tahun 2023	38
Internalisasi BTN Mobile	41
Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Data Nasabah Tahun 2023	41
Internalisasi <i>Security Awareness</i> Pengelolaan <i>User ID</i> dan <i>Password</i>	36
Compliance Excellence Edisi Februari 2023 Kebijakan Sistem Management Anti Penyuapan (SMAP)	41
Sosialisasi Sadar Risiko Hukum	39
Compliance Excellence Edisi April 2023 - <i>Know Your Employee</i>	42
Webinar I APU dan PPT Tahun 2023	40
Compliance Excellence Edisi Juni 2023 - Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	41

Jenis Pelatihan dan Pendidikan	Jumlah Peserta
Compliance Excellence Edisi Juli 2023 - <i>Data Privacy Awareness</i>	42
Internalisasi Tata Kelola Perusahaan (GCG) dan <i>Code of Conduct</i>	42
Sosialisasi Implementasi Petunjuk Teknis <i>Fraud Risk Assessment (FRA)</i>	40
Internalisasi Manajemen Risiko TI, Digital dan Siber 2023	36
Sosialisasi <i>Security Awareness</i> Periode Agustus 2023	1
Internalisasi <i>Know Your Employee (KYE)</i>	43
Internalisasi PPDigital serta Kebijakan dan Prosedur Baru BTN	43
Compliance Excellence Edisi September 2023 - <i>Virtual Branch & Online Onboarding for Open Account</i>	43
AMOLA <i>Mini Series</i> Episode 3 Tahun 2023	43
Compliance Excellence Edisi Oktober 2023 - Produk KRING BTN Pra Pensiun dan Pensiunan	43
Internalisasi Campaign Program <i>Road Map & Inisiatif Strategis Human Capital 2023 – 2025</i>	38
Internalisasi Kebijakan Standar Layanan Outlet Bank BTN	40
Compliance Excellence Edisi November 2023 - Limitasi Kewenangan Penyetoran dan Pengambilan Dana serta Layanan <i>Pick Up Service</i>	43
Internalisasi <i>Podcast Legal Clinic Live Session</i> Tahun 2023	33
Internalisasi <i>Strategic Business Unit (SBU)</i>	43
Internalisasi Peraturan Internal Baru Kebijakan Umum Manajemen Risiko	37
Total Peserta Pendidikan & Pelatihan	1187

Program Kerja dan Pelaksanaan Tugas Fungsi Kepatuhan

Pada tahun 2023, Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan pada Perseroan di antaranya mencakup hal-hal sebagai berikut:

- Salah satu Pengawasan Aktif Direksi adalah memastikan terlaksananya Fungsi Kepatuhan serta menumbuhkan dan mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Perseroan. Sehubungan hal tersebut, Direksi telah menyetujui dan menetapkan Kebijakan Kepatuhan Perseroan yang diusulkan oleh Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan yang merupakan pedoman dalam pelaksanaan bisnis dan operasional perbankan serta menyetujui dan menetapkan Prosedur Kepatuhan sebagaimana usulan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun peraturan internal Perseroan agar senantiasa sesuai serta tidak melanggar ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan peraturan perundang undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah.
- Pengawasan Dewan Komisaris terhadap Fungsi Kepatuhan Perseroan di antaranya adalah turut memberikan review dan persetujuan terhadap Kebijakan Kepatuhan Perseroan sebelum ditetapkan oleh Direksi.
- Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan dalam Tata Kelola Perusahaan. Dalam setiap proses pengambilan keputusan dan pembahasan terkait bisnis dan operasional Perseroan yang dilaksanakan dalam forum Rapat Direksi, Direksi senantiasa memperhatikan pendapat aspek kepatuhan yang disampaikan oleh Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dan/atau Satuan Kerja Kepatuhan yang menyampaikan ketentuan-ketentuan regulator terkait dengan materi pembahasan Rapat Direksi.
- Untuk mendukung pertumbuhan bisnis perseroan yang berkelanjutan dengan tetap memperhatikan aspek Kepatuhan, maka diperlukan langkah harmonisasi antara kepentingan perseroan dengan kepatuhan dalam ketaatan terhadap seluruh ketentuan Regulator yang mengatur. Dalam rangka memenuhi hal tersebut, Perseroan telah melakukan langkah-langkah Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan yang mencakup hal-hal sebagai berikut:

a. Penyampaian Kajian Kepatuhan

Dalam rangka memastikan kesesuaian peraturan internal, produk dan/atau aktivitas Perseroan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia serta Otoritas Pengawas dan Pengatur Lainnya yang berlaku, Satuan Kerja Kepatuhan menyampaikan kajian aspek kepatuhan atas rancangan ketentuan internal serta rencana aktivitas aktivitas dan rencana kegiatan operasional bisnis yang akan disahkan dan ditetapkan Direksi untuk memastikan bahwa rancangan ketentuan internal dan rencana kegiatan tersebut telah selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Regulator yang berlaku.

b. Pelaksanaan *Compliance Check List*

Satuan Kerja Kepatuhan melakukan proses *Compliance Check List* atas beberapa aktivitas yang diwajibkan oleh Regulasi Perbankan diantaranya adalah:

- *Compliance Check List* Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Pengurus Perseroan;
- *Compliance Check List* Pengajuan Penyelenggaraan Produk Bank Baru;
- *Compliance Check List* untuk Rencana Pembukaan, Relokasi, Peningkatan Status Jaringan Kantor.

5. Dalam rangka menciptakan budaya kepatuhan serta memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Perseroan telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan, Perseroan merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan dengan dilaksanakan aktivitas-aktivitas sebagai berikut:

a. Program Meningkatkan Budaya Kepatuhan

– *Compliance Excellence*

Tujuan program ini adalah agar pegawai memiliki pemahaman dan penafsiran yang sama terkait ketentuan yang ada serta meningkatkan *compliance culture awareness* di seluruh organisasi. Materi yang dipilih berdasarkan data *fraud* dari *Internal Audit Division* (IAD), Top 10 Risk dari *Enterprise Risk Management Division* (ERMD), pengenalan sanksi disiplin dari *Human Capital Management Division* (HCMD) dan masukan dari Pegawai Satuan Kerja Kepatuhan.

Sepanjang periode Tahun 2023, telah dilaksanakan *Compliance Excellence* yang diikuti oleh seluruh Pegawai sebagaimana dimaksud di atas yakni sebagai berikut:

No	Bulan	Materi
1	Februari	Kebijakan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001 : 2016
2	Maret	Penerapan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa (PMPJ) / <i>Customer Due Diligence</i> (CDD) dalam Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT)
3	April	<i>Know Your Employee</i>
4	Mei	Sistem Pengaduan Nasabah
5	Juni	Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa

No	Bulan	Materi
6	Juli	<i>Data Privacy Awareness</i>
7	Agustus	Prosedur Pengelolaan Mesin ATM, CDM, dan CRM
8	September	<i>Virtual Branch & Online Onboarding for Open Account</i>
9	Oktober	Kredit Ringan (KRING) BTN Pra Pensiun dan Pensiunan
10	November	Limitasi Kewenangan Penyetoran dan Pengambilan Dana serta Layanan <i>Pick Up Service</i>
11	Desember	Prosedur Penyesuaian Kenaikan Limit Wewenang Transaksi dan Layanan <i>Pick Up Service</i>

– *Compliance Broadcast*

Kegiatan penyampaian konten dan/atau informasi terkait Kepatuhan yang relevan kepada seluruh Pegawai melalui media *email* yang dimiliki Perseroan secara rutin. Tujuan *compliance broadcast* adalah untuk meningkatkan literasi terkait Kepatuhan dan membangun Budaya Patuh kepada seluruh Pegawai. Langkah-langkah yang dilakukan Perseroan tersebut ditujukan untuk membangun dan meningkatkan *awareness* pegawai atas kejadian-kejadian *fraud*, menyusun mitigasi risiko untuk mencegah terjadinya *fraud*, meningkatkan Budaya Kepatuhan pada proses bisnis serta operasional di Kantor Cabang dan Kantor Wilayah.

b. Internalisasi Ketentuan Regulator yang Baru

Satuan Kerja Kepatuhan telah melakukan internalisasi ketentuan Regulator terbaru yang diterbitkan selama Tahun 2023 kepada seluruh Unit Kerja dan Pegawai untuk meningkatkan pengetahuan serta untuk memastikan, memahami dan mematuhi Regulasi baru melalui *email broadcast*.

Selain telah disampaikan melalui *email broadcast*, juga dilakukan internalisasi melalui memo kepada Unit Kerja pemilik dan pengelola kebijakan untuk melakukan penyesuaian aturan internal jika diperlukan dan/atau kepada Unit Kerja yang dapat membantu dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan yang diinternalisasikan tersebut, yaitu Satuan Kerja Audit Internal, Satuan Kerja Manajemen Risiko serta Satuan Kerja Kebijakan dan Prosedur. Selain itu juga telah dilakukan penelaahan terhadap kewajiban pelaporan dan juga penentuan Divisi sebagai penanggung jawab laporan tersebut kepada Regulator dan/atau Lembaga Pengawas dan Pengatur Lainnya. Seluruh ketentuan Regulator yang telah terbit telah diupload pada *Compliance Regulatory Management System* (CRMS) sebagai sumber referensi dan *database* ketentuan Regulator yang dapat diakses oleh Pegawai. Hal ini diharapkan memberikan dampak kepada Unit Kerja pemilik dan pengelola kebijakan untuk melakukan penyesuaian terhadap peraturan internal, penelaahan terhadap kewajiban pelaporan dan penetapan Divisi penanggung jawab laporan kepada Regulator.

6. Upaya Peningkatan Kepatuhan Kantor Cabang

a. *Regional Compliance Officer* (RCO)

Dalam rangka meningkatkan Kepatuhan pada Kantor

Cabang, Satuan Kerja Kepatuhan berkomitmen untuk mengoptimalkan peranan *Regional Compliance Officer* (RCO) yang berperan sebagai *Second Line of Defense* di Kantor Wilayah dalam membantu membangun dan memantau pengendalian risiko terhadap Kantor Cabang sesuai binaannya. Adapun tugas dan tanggung jawab *Regional Compliance Officer*, meliputi:

- Melakukan internalisasi melalui media virtual dan kunjungan langsung ke Kantor Cabang/ Kantor Cabang Syariah di wilayah kerjanya untuk memastikan implementasi program-program Budaya Kepatuhan terkait Pelaksanaan Program APU dan PPT, Pengendalian Gratifikasi, Internalisasi CRMS (*Compliance Regulatory Management System*), Internalisasi parameter Peta Kepatuhan yang perlu menjadi perhatian dengan menggunakan *Dashboard* Peta Kepatuhan dan Internalisasi program *Compliance Culture Awareness* menggunakan *Dashboard Compliance Excellence*.
- Memberikan opini kepatuhan secara independen terkait proses bisnis dan operasional atas permintaan Kantor Cabang dan Kantor Cabang Syariah serta Kantor Wilayah.
- Melakukan analisis dan evaluasi kepatuhan dan memonitor tindak lanjut laporan kepatuhan Kantor Wilayah serta Kantor Cabang dan Kantor Cabang Syariah sesuai wilayah supervisi sebagai upaya meningkatkan *Compliance Control*.
- Mengingatkan Kantor Cabang, Kantor Cabang Syariah, dan Kantor Wilayah terkait hasil pemeriksaan dan/atau penilaian atas yang disampaikan oleh Divisi/Pihak Eksternal kemudian menyampaikan risiko dan dampak yang berpotensi terjadi serta memberikan usulan upaya yang dapat dilakukan untuk memitigasi risiko kepatuhan.
- Melakukan reviu terhadap ketentuan internal berdasarkan masukan dari unit bisnis dan operasional di Kantor Cabang.

b. Pelaksanaan *Branch Visit*

Dalam rangka memastikan pelaksanaan Budaya Kepatuhan telah sesuai dengan skor peta kepatuhan dan meningkatkan kesadaran risiko kepatuhan pada semua tingkatan organisasi, mengetahui gambaran implementasi budaya kepatuhan di Kantor Cabang (KC), Kantor Cabang Syariah (KCS) termasuk outlet-outlet di bawahnya serta mendapatkan *feedback* dan informasi guna evaluasi program budaya kepatuhan, Perseroan telah melaksanakan *Branch Visit* dengan tema *Internalization and Strengthening Compliance Culture*. Kegiatan *branch visit* melibatkan peran aktif manajemen KC dan KCS melalui presentasi oleh Manajemen KC dan KCS terkait pelaksanaan Budaya Kepatuhan, pelaksanaan *focus group discussion* (FGD) untuk merumuskan implementasi dan peningkatan Budaya Kepatuhan di KC dan KCS ke depan serta komitmen manajemen KC dan KCS untuk meningkatkan kesadaran risiko khususnya terkait risiko kepatuhan pada bisnis dan

operasional di masing-masing unit kerja.

Pelaksanaan *Branch Visit* yang telah dilakukan memberikan dampak sebagai berikut:

- Manajemen KC dan KCS berkomitmen untuk konsisten membangun dan meningkatkan Budaya Kepatuhan dengan mengikutsertakan peran aktif seluruh pegawai dalam menjalankan program-program budaya perusahaan dan mengingatkan kepada seluruh pegawai untuk mencegah terjadinya *fraud*.
- Manajemen KC dan KCS berkomitmen akan mengoptimalkan peran *Branch Business Control* dan terus berkoordinasi serta berkomunikasi dengan *Regional Compliance Officer* untuk mitigasi risiko operasional dan risiko kepatuhan.

7. Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan pada proses Pra Rapat Komite Kredit (Pra RKK) dan Rapat Komite Kredit (RKK)

Satuan Kerja Kepatuhan telah melakukan pelaksanaan Fungsi Kepatuhan pada proses bisnis perkreditan komersial yaitu pada saat Pra Rapat Komite Kredit (Pra RKK) dan Rapat Komite Kredit (RKK) melalui unit *Compliance Credit Consulting*. *Compliance Credit Consulting* bertugas untuk memberikan masukan terhadap aspek kepatuhan terkait pemenuhan persyaratan yang terkait dengan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), legalitas debitur dan usaha, legalitas proyek yang dibiayai, kemampuan, modal, prospek usaha serta agunan. Diharapkan, dengan adanya pembahasan pada forum Pra RKK, isu atau permasalahan terkait kepatuhan dapat dimitigasi sehingga keputusan kredit terhindar dari risiko Kepatuhan.

Hal ini memberikan dampak bagi Perseroan bahwa isu atau permasalahan terkait kepatuhan dapat dimitigasi sehingga keputusan kredit terhindar dari risiko Kepatuhan dan setiap keputusan kredit komersial tidak melanggar serta telah sesuai dengan ketentuan Regulator serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Pelaksanaan Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT, dan PPPSPM) dengan mengacu pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka penerapan program APU, PPT dan PPPSPM ini Perseroan melakukan beberapa aktivitas yang diuraikan tersendiri pada bab APU, PPT, dan PPPSPM.

PENGELOLAAN RISIKO KEPATUHAN

Pengelolaan risiko kepatuhan dilaksanakan secara berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan budaya kepatuhan pada seluruh kegiatan bisnis dan setiap jenjang organisasi Perseroan sekaligus dalam rangka memitigasi Risiko Kepatuhan Perseroan.

1. Risiko Kepatuhan yang Dihadapi

Salah satu dampak yang timbul akibat tereksposnya risiko kepatuhan adalah sanksi berupa denda dan teguran tertulis dari pihak regulator yang dalam hal ini adalah Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dan/atau Regulator lainnya yang terkait.

2. Potensi Risiko Kepatuhan

Berikut potensi-potensi risiko kepatuhan yang akan dihadapi

oleh Perseroan pada masa mendatang antara lain sebagai berikut:

- a. Hasil Pemeriksaan Regulator
Penyebab atas terjadinya pengenaan denda oleh Regulator adalah hasil pemeriksaan oleh Regulator, atas laporan-laporan yang telah dikirimkan oleh Perseroan sebelumnya kepada Regulator.
- b. Keterlambatan penyampaian koreksi laporan
Keterlambatan penyampaian koreksi atas laporan yang telah disampaikan kepada Regulator di luar batas waktu yang ditetapkan.
- c. Keterlambatan dan/atau tidak menyampaikan laporan
Kurangnya supervisi atasan, internal kontrol dan *monitoring* dalam penyampaian laporan sesuai sebagaimana diatur dalam ketentuan Regulator.

- d. Kesalahan data
Kesalahan dalam proses *mapping source* pengkategorian data untuk kebutuhan pelaporan, kesalahan penginputan oleh pegawai pada sistem dan potensi kesalahan formulasi atau perhitungan yang belum sesuai ketentuan pedoman pelaporan.

3. Upaya Mitigasi Risiko Kepatuhan

Sebagai langkah pencegahan terhadap potensi-potensi risiko kepatuhan di masa mendatang di atas, Satuan Kerja Kepatuhan melakukan beberapa upaya untuk memitigasi risiko kepatuhan, antara lain:

- a. Imbuan Direksi melalui memo kepada seluruh Divisi, Kantor Wilayah, Kantor Cabang dan Kantor Cabang Syariah terkait Mitigasi Sanksi Denda dan/atau Teguran Tertulis dari Regulator.
- b. Satuan Kerja Kepatuhan berkoordinasi dengan melakukan *remapping* dan *update* kewajiban pelaporan ke Regulator serta penanggung jawab penyampaian Pelaporan pada masing-masing Divisi. Untuk selanjutnya, Satuan Kerja Kepatuhan juga menyampaikan agar seluruh Divisi secara aktif berkoordinasi menyampaikan *update* laporan regulator yang baru kepada Satuan Kerja Kepatuhan apabila belum terdapat di dalam daftar pelaporan *existing* di *Compliance Regulatory Management System* (CRMS).
- c. Melalui *Compliance Regulatory Management System* (CRMS) telah disampaikan *email* notifikasi sebagai *reminder* sebelum jatuh tempo laporan kepada seluruh Divisi yang memiliki kewajiban pelaporan kepada Regulator dan/atau pihak eksternal serta monitoring pengembangan Produk Bank baru (PPB) dan Kegiatan Baru untuk Kepentingan Bank (KKB) dan Kegiatan sebagai Penyedia Jasa Teknologi Informasi dan/atau menerbitkan Produk Layanan Perbankan Elektronik untuk *reminder* kewajiban laporan realisasi kepada Regulator.
- d. Satuan Kerja Kepatuhan bersama dengan Satuan Kerja Pengelola Data dan Satuan Manajemen Risiko telah melakukan pembahasan Petunjuk Teknis (PT) tentang Tata Kelola Data khususnya terkait RACI (*Responsible, Accountable, Consulted* dan *Informed*) Matriks Proses Pelaporan ke Regulator salah satunya menambahkan aktivitas validasi data oleh Divisi

Pemilik Data (*Data Owner*) untuk memastikan kualitas dan kebenaran data sebelum dilaporkan oleh Divisi Penanggung Jawab Pelaporan ke Regulator. Hal tersebut diharapkan dapat memberikan dampak perbaikan pada proses pelaporan ke Regulator sehingga memenuhi prinsip Lengkap, Akurat, Kini dan Utuh (LAKU) untuk memitigasi adanya kesalahan data dan terjadinya temuan berulang oleh Regulator.

- e. Satuan Kerja Kepatuhan dan Satuan Kerja Manajemen Risiko melakukan pembahasan dan *mapping* bersama Divisi terkait pemisahan tugas (*segregation of duties*) terkait proses pelaporan ke Regulator atau Otoritas Pengawas lainnya tersebut di atas yaitu fungsi *maker*, *checker* dan *approval* mulai dari pemilik data, penyedia data dan penanggungjawab pelaporan.

4. Mitigasi Risiko Kepatuhan Lainnya

a. Peta Kepatuhan

Satuan Kerja Kepatuhan telah menyusun Peta Kepatuhan sebagai salah satu strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank dan alat untuk menilai tingkat kepatuhan Kantor Cabang dan Kantor Wilayah dengan parameter yaitu:

- Denda Kantor Cabang
- Laporan temuan signifikan/Fraud
- Skor Budaya Perusahaan
- Persentase Penyelesaian Laporan *Branch Business Control* (BBC)

Melalui Peta Kepatuhan, akan memberikan dampak bagi Kantor Cabang dan Kantor Wilayah untuk meningkatkan *awareness* terhadap 4 (empat) parameter serta perbaikan proses bisnis dan operasional di Kantor Cabang.

b. *Compliance Dashboard*

Satuan Kerja Kepatuhan telah mengembangkan *Compliance Dashboard* untuk memitigasi potensi ketidakpatuhan dengan menyampaikan konfirmasi dan verifikasi data parameter *Compliance Dashboard* kepada Unit Kerja terkait. Melalui optimalisasi penggunaan *Compliance Dashboard* akan memberikan dampak bagi Unit Kerja terkait untuk menyusun langkah-langkah *preventif* untuk meminimalkan risiko operasional dan risiko kepatuhan serta memitigasi terjadinya pelanggaran terhadap peraturan yang telah ditetapkan.

PELAKSANAAN AKTIVITAS KEPATUHAN LAINNYA

Perseroan juga melakukan penyempurnaan proses bisnis secara berkelanjutan yang menjadi bagian dari pelaksanaan aktivitas kepatuhan, antara lain:

1. Dalam rangka penerapan ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), Satuan Kerja Kepatuhan menjalankan peran sebagai Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP) yang memiliki tugas antara lain: mengawasi rancangan dan penerapan SMAP, menyediakan petunjuk dan pedoman Pegawai atas SMAP, memastikan SMAP sesuai dengan persyaratan standar yang berlaku, melaporkan kinerja SMAP pada *Governing Body* dan *Top Management*. Bank BTN

telah mendapatkan Sertifikasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) pada ruang lingkup pengadaan barang dan/atau jasa pada *Procurement and Fixed Asset Management Division* (PFAD), perkreditan Komersial pada *Commercial Banking Division* (CMBD), *Corporate Banking Division* (CBD), dan *Wholesales Credit Risk Division* (WRD), dan perkreditan small medium pada seluruh Kantor Wilayah pada *SME Restructuring*. Dalam rangka mempertahankan sertifikasi ISO SMAP telah dilaksanakan audit oleh Badan Sertifikasi pada tanggal 24 - 28 Juli Tahun 2023 dengan hasil seluruh ruang lingkup *Re-sertifikasi* maupun *Surveillance* ISO 37001:2016 SMAP berhasil mempertahankan sertifikat ISO 37001:2016 SMAP. Selain itu pada Tahun 2023 juga telah dilakukan perluasan lingkup pada *Small Medium Enterprise Banking Division* (SMBD) dan 4 *Commercial Banking Center* (Jakarta Raya, Bintaro, Bekasi dan Bandung) dan telah dilaksanakan audit perluasan ruang lingkup ISO 37001:2016 SMAP oleh Badan Sertifikasi tanggal 14 s.d. 20 Desember Tahun 2023 pada ruang lingkup *Small Medium Enterprise Banking Division* (SMBD) dan 4 *Commercial Banking Center* (Jakarta Raya, Bintaro, Bekasi dan Bandung) dengan hasil seluruh ruang lingkup berhasil mendapatkan sertifikat ISO 37001:2016 SMAP.

2. Bank BTN telah mendapatkan Sertifikasi ISO 37301:2021 Sistem Manajemen Kepatuhan pada tanggal 30 Desember 2022 dengan ruang lingkup implementasi pada *Compliance & Governance Division*, dan cakupan meliputi fungsi *compliance, corporate governance, and anti money laundering*. Implementasi ISO SMK memberikan panduan dan kerangka standarisasi serta perbaikan proses bisnis kepatuhan. Dalam rangka mempertahankan ISO 37301:2021, pada tahun 2023 telah dilakukan Audit *Surveillance* dan Satuan Kerja Kepatuhan berhasil mempertahankan Sertifikasi ISO 37301:2021 Sistem Manajemen Kepatuhan.
3. Penerapan Integrated Governance Risk and Compliance (GRC) di Perseroan. Sejalan dengan hasil cetak biru transformasi Perseroan yaitu mencapai integrated GRC dengan pelaksanaan praktek-praktek *governance*, manajemen risiko dan kepatuhan secara terintegrasi. Dalam Penilaian GRC Indeks, akan dilaksanakan suatu metode *assessment* kepada setiap unit kerja dengan alat ukur *Key Performance Indicator, Key Risk Indicator, dan Key Compliance Indicator*. Masing-masing unit kerja akan memiliki GRC Indeks yang merupakan indikator penerapan aspek *governance*, manajemen risiko dan kepatuhan secara terintegrasi.
4. Pelaksanaan fungsi Satuan Kerja Kepatuhan dalam rangka Perlindungan Data Pribadi (*Data Privacy*). Perseroan berkomitmen untuk melaksanakan implementasi Undang-undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) untuk memastikan kepatuhan dan kesesuaian proses bisnis Bank BTN terhadap amanat Undang-undang. Selain itu Perseroan senantiasa berkomitmen untuk melindungi Data Pribadi (termasuk nasabah, pegawai dan vendor), terkait dengan penggunaan layanan produk dan/atau jasa perbankan yang ditawarkan oleh Bank.

Dalam undang-undang tersebut hal penting yang diatur diantaranya sebagai berikut:

- a. Hak Subjek Data Pribadi - (Pasal 5 -16).
- b. Persetujuan Nasabah (*Customer Consent*) – (Pasal 20-21).
- c. Kewajiban Pengendali dan Prosesor Data Pribadi – (Pasal 27-30).
- d. Perekaman Pemrosesan Data Pribadi / *Record of Data Processing* (ROPA) – (Pasal 31).
- e. Penilaian Dampak Pelindungan Data Pribadi / *Data Privacy Impact Assessment* (DPIA) – Pasal 34).
- f. Penanganan Insiden (Pasal 35, 39 dan 46).
- g. Fungsi Pejabat Pelindung Data Pribadi (Pasal 53-54).
- h. Kerja sama dengan Pihak Ketiga – (Pasal 18 dan Pasal 60).

Atas komitmen tersebut, Perseroan melalui Satuan Kerja Kepatuhan telah melakukan tindak lanjut terkait Pelindungan Data Pribadi diantaranya:

- a. Telah dilaksanakan *sharing session* terkait Undang-undang Perlindungan Data Pribadi bersama Direksi, Perwakilan Divisi, Kantor Wilayah, Kantor Cabang, dan Kantor Cabang Syariah. *Sharing session* tersebut membahas ketentuan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi yang berdampak bagi bisnis Bank serta hal-hal kritis yang perlu menjadi perhatian manajemen dalam proses implementasi.
- b. Melakukan *Gap Assessment* untuk memberikan gambaran kondisi bisnis *existing (business as usual)* yang berjalan dengan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi dan kebijakan terkait lainnya melalui *review proses business as usual* dan pelaksanaan *interview session* dengan seluruh Divisi terkait proses, produk dan/atau layanan yang menggunakan data pribadi dengan kebijakan atau prosedur internal yang berlaku.

Selanjutnya, Perseroan akan melakukan beberapa pelaksanaan dalam rangka internalisasi Undang-undang Perlindungan Data Pribadi pada bisnis perusahaan diantaranya:

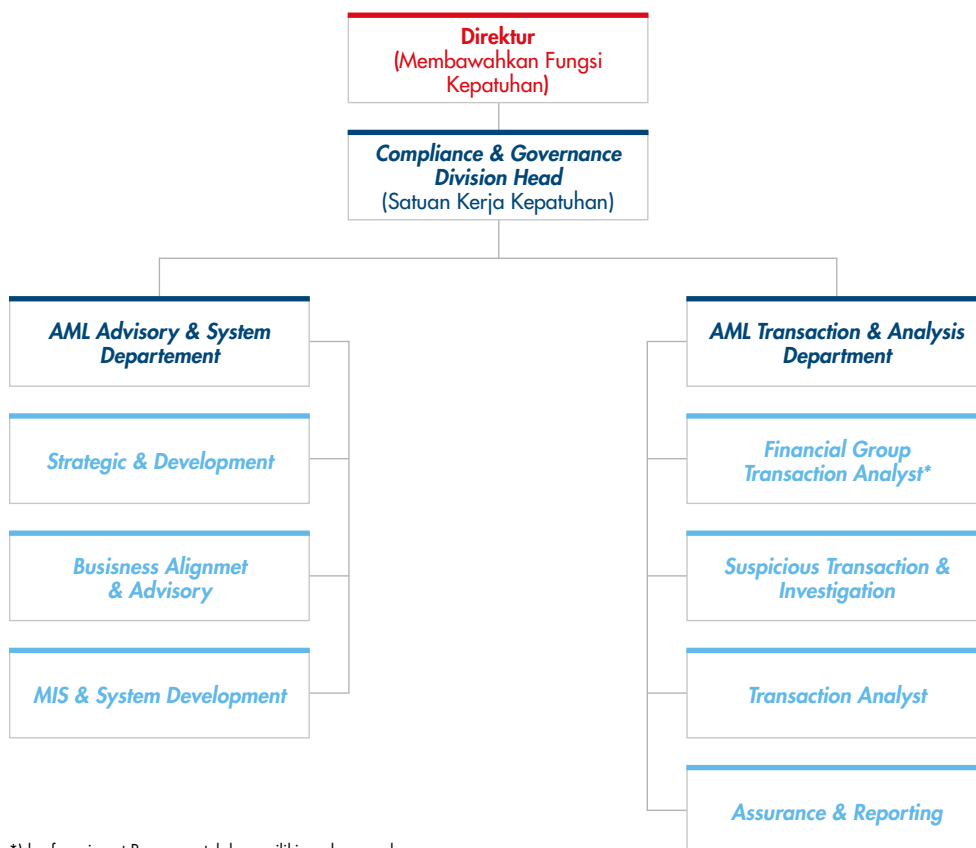
- a. Kajian atas *operating model* yang perlu diterapkan dalam memastikan pembentukan fungsi Pejabat Pelindungan Data Pribadi yang akan melakukan *supervise* terkait kepatuhan terhadap Undang-undang Perlindungan Data Pribadi.
- b. Penyusunan kebijakan, prosedur, *framework* (kerangka), dan *template* untuk proses Persetujuan Nasabah (*customer consent*), hak Subjek Data Pribadi, Kerjasama dengan Pihak Ketiga, Penanganan Kebocoran Data, Proses Penilaian Dampak Perlindungan Data Pribadi dan Proses Perekaman atas pemrosesan Data Pribadi.
- c. Implementasi *Privacy by Design* untuk seluruh proses Bank yang meliputi:
 - Memastikan persetujuan Subjek Data Pribadi yang sah secara eksplisit.
 - Memastikan penyusunan Proses Perekaman atas Pemrosesan Data Pribadi dan Proses Penilaian Dampak Perlindungan Data Pribadi untuk seluruh proses yang menggunakan Data Pribadi.
 - Memastikan Perjanjian Kerja Sama kerjasama dengan pihak ketiga mengakomodasi ketentuan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi.
 - Perlindungan Data Pribadi secara *end to end*.

Program Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT), dan Pencegahan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM)

Perseroan menerapkan program APU, PPT, dan PPSPM dalam aktivitas pengenalan nasabah dengan mengacu pada peraturan dan perundang-undangan. Sebagai bagian dari upaya mendorong efektivitas penerapan program APU, PPT, dan PPSPM dan memenuhi ketentuan regulator, Perseroan membentuk Unit Kerja Khusus (UKK) APU, PPT, dan PPSPM di Kantor Pusat. Selain itu, pelaksanaan program APU, PPT, dan PPSPM di *Regional Office* dan Kantor Cabang menjadi tanggung jawab masing-masing *Regional Office Head* dan *Branch Manager*.

Struktur Organisasi Dalam Penerapan Program APU, PPT, dan PPSPM

Pelaksanaan program APU dan PPT dilakukan oleh Unit Kerja Khusus (UKK) APU, PPT, dan PPSPM yang secara struktural berada di bawah Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) Kantor Pusat dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan yang dapat digambarkan sebagai berikut:



*) berfungsi saat Perseroan telah memiliki anak perusahaan

Untuk mencapai penerapan program APU, PPT, dan PPSPM dijalankan secara efektif dan memenuhi ketentuan regulator, selain UKK APU, PPT, dan PPSPM di Kantor Pusat, program APU, PPT, dan PPSPM juga dilakukan di Kantor Wilayah dan Kantor Cabang.

Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT)

Penyampaian Laporan dan Data kepada Regulator dan/atau APH

1. Menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan kepada PPATK sebagai berikut:
 - a. Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT);
 - b. Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM);
 - c. Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana dari dan ke Luar Negeri (LTKL);
 - d. Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu (SIPESAT).

2. Menyampaikan Pemenuhan Data/ Informasi kepada Aparat Penegak Hukum & Regulator sebagai berikut:
 - a. Sistem Informasi Program APU PPT (SIGAP) kepada OJK;
 - b. Laporan APU PPT melalui Aplikasi APOLO OJK;
 - c. Sistem Informasi Terduga Pendanaan Terorisme (SIPENDAR) kepada PPATK;
 - d. Pertukaran Data Elektronik (PEDAL) kepada KPK;
 - e. Pemenuhan Permintaan data Oleh LPP dan APGAKUM lainnya yakni Kepolisian, Badan Narkotika Nasional, Kejaksaan.
3. Menyampaikan Laporan terkait dengan Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada kepada PPATK sebagai berikut:
 - a. Ikut serta dalam *Collaborative Analysis Team* (CAT) yang merupakan kolaborasi pertukaran informasi antara Sektor Publik yaitu PPATK, pihak pelapor, Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP), Aparat Penegak Hukum;
 - b. Melakukan pemantauan terhadap Rekening Dana Khusus Kampanye (RKDK);
 - c. Melakukan *screening* terhadap Bendahara Parpol, Dewan Pengurus Pusat dan Wilayah;
 - d. Melakukan *screening* terhadap Daftar Calon Tetap (DCT) peserta Pemilu dan Pilkada yang disampaikan oleh PPATK;
 - e. Menyampaikan seluruh laporan dan permintaan informasi yang terkait dengan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada tahun 2024.

Program Awareness Strategic Initiative

1. AML Creative Campaign 2023
 - a. AMOLA TikTok Competition 2023
AMOLA Tiktok Competition merupakan kompetisi pembuatan konten bertemakan APU, PPT, dan PPPSPM melalui media sosial TikTok dengan menggunakan hasil karya AMOLA Cipta *Jingle* Tahun 2022. Adapun peserta AMOLA TikTok Competition diikuti oleh perwakilan

masing-masing Unit Kerja dari Kantor Pusat, Kantor Wilayah dan Kantor Cabang.

- b. AMOLA Mini-Series Tahun 2023
AMOLA Mini-Series merupakan film pendek (*short movie*) dengan tema seputar penerapan Program APU, PPT, dan PPPSPM meliputi Tipologi Tindak Pidana Pencucian Uang, Tahapan Pencucian Uang, serta Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ)/Customer Due Diligence (CDD) yang terdiri dari 3 (tiga) episode. Adapun penayangan AMOLA Mini-Series telah dilaksanakan secara masif melalui berbagai media internal Bank.
2. Internalisasi Awareness APU, PPT, dan PPPSPM 2023
 - a. Webinar APU, PPT, dan PPPSPM Tahun 2023
Bank BTN menyelenggarakan *On Boarding Session* APU, PPT, dan PPPSPM Tahun 2023 melalui Webinar APU, PPT, dan PPPSPM dengan mendatangkan Narasumber dari pihak eksternal (dhi. PPARK dan Praktisi Perbankan).
 - b. Workshop APU, PPT, dan PPPSPM Tahun 2023
Bank BTN menyelenggarakan *Workshop* Internalisasi Ketentuan POJK Nomor 8 Tahun 2023 untuk meningkatkan pemahaman pegawai dan pemenuhan terkait dampak implementasi POJK Nomor 8 Tahun 2023.
3. Branch Visit dan Surprise Review
Branch Visit dilakukan untuk meningkatkan *awareness* dari Kantor Cabang dengan melakukan internalisasi ke Kantor-kantor Cabang dengan mempertimbangkan sebaran Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) terbanyak, Kepemilikan WNA yang berasal dari Negara berisiko tinggi serta *auditee* dari Audit Tematik APU dan PPT tahun 2022.

Di samping itu dilakukan *Surprise Review* kepada Kantor Cabang yang telah dikunjungi untuk memastikan kembali pemahaman pegawai dan evaluasi efektivitas atas kegiatan *Branch Visit*.

Perkara Hukum

Tabel Perkara Hukum

No.	Perkara Hukum	Jumlah		
		Perdata	Pidana	Hubungan Industrial
1	Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	137	8	3
2	Dalam proses penyelesaian	151	9	2
Total		288	17	5

Perkara Hukum yang Dihadapi Perusahaan

Tabel Perkara Hukum yang Dihadapi Perusahaan

No	Pokok Perkara / Gugatan	Status Penyelesaian	Pengaruhnya terhadap kondisi Perusahaan	Upaya Manajemen	Sanksi yang dikenakan	Risiko dan Nominal Potensi Kerugian
1	Gugatan terkait dengan penyelesaian sertifikat debitur lunas.	Proses Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung	Risiko Bank membayar Ganti Rugi	Bank BTN mengajukan Memori Peninjauan Kembali (PK)	Tidak Ada	Materiel: Rp1.191.779.350,-

No	Pokok Perkara / Gugatan	Status Penyelesaian	Pengaruhnya terhadap kondisi Perusahaan	Upaya Manajemen	Sanksi yang dikenakan	Risiko dan Nominal Potensi Kerugian
2	Gugatan terkait dengan penyelesaian sertifikat debitur lunas.	Proses Kasasi di Mahkamah Agung	Risiko Bank membayar Ganti Rugi	Bank BTN mengajukan upaya hukum Kasasi	Tidak Ada	Materiel: Rp108.000.000,-
3	Gugatan atas fraud yang dilakukan agen marketing pihak ketiga yang mengajukan kredit fiktif pada bank lain dan pencairannya dilakukan melalui rekening Bank BTN.	Proses Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung	Risiko Bank membayar Ganti Rugi	Bank BTN mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK)	Tidak Ada	Materiel: Rp2.436.962.487,-
4	Gugatan terkait dengan sengketa tanah agunan.	Proses Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung	Risiko Bank membayar Ganti Rugi	Bank BTN mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK)	Tidak Ada	Materiel: Rp1.699.100.000,-
5	Gugatan terkait dengan Bank Garansi.	Proses Kasasi di Mahkamah Agung	Risiko Bank membayar Ganti Rugi	Bank BTN mengajukan upaya hukum Kasasi	Tidak Ada	Materiel: Rp14.138.723.096,-
6	Gugatan terkait dengan konflik internal debitur yang mendudukkan Bank BTN sebagai pihak dalam gugatan.	Proses Kasasi di Mahkamah Agung	Risiko Bank membayar Ganti Rugi	Bank BTN mengajukan upaya hukum Kasasi	Tidak Ada	Materiel: Rp2.635.000.000,-

Selama tahun 2023 tidak terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht) yang menyatakan bahwa Perseroan terbukti melakukan pelanggaran atas masalah ketenagakerjaan/pekerjaan/konsumen atau nasabah/kebangkrutan/komersial/kompetisi atau lingkungan hidup.

Permasalahan Hukum yang Sedang Dihadapi Dewan Komisaris dan Direksi yang Sedang Menjabat

Selama tahun 2023, tidak terdapat permasalahan hukum yang sedang dihadapi Dewan Komisaris dan Direksi yang sedang menjabat.

Permasalahan Hukum yang Sedang Dihadapi Anak Perusahaan

Sampai dengan tahun 2023, Bank BTN belum memiliki Entitas Anak, sehingga tidak terdapat informasi permasalahan hukum yang sedang dihadapi oleh Entitas Anak.

Sanksi Administratif yang Dikenakan Kepada Perusahaan, Anggota Dewan Komisaris dan Direksi oleh Otoritas Pasar Modal dan Otoritas Lainnya

Perseroan berupaya memenuhi tanggung jawab dan mematuhi setiap Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan maupun Otoritas lainnya yang berlaku bagi Perseroan. Sepanjang tahun 2023, tidak terdapat sanksi administratif yang dikenakan kepada Perseroan dan memengaruhi kelangsungan usaha Perseroan serta tidak terdapat sanksi administratif yang

dikenakan kepada anggota Direksi maupun anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Akses Informasi dan Data Perusahaan

Perseroan menyediakan akses informasi dan data baik laporan terkait keuangan dan non - keuangan kepada publik secara transparan melalui berbagai media seperti situs web (dalam dua bahasa), media massa (siaran pers), majalah/buletin internal, pertemuan dengan analis, situs resmi BEI, poster dan banner produk, aksi korporasi, bahan presentasi Perseroan ke publik dan sebagainya. Akses informasi Perseroan mengenai informasi finansial dan perusahaan, antara lain dapat dilakukan melalui media sebagai berikut:

1. **Website www.btn.co.id** yang disajikan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris serta menyampaikan informasi mengenai:
 - a. Informasi pemegang saham;
 - b. Analisis kinerja keuangan;
 - c. Laporan keuangan tahun selama 5 (lima) tahun terakhir;
 - d. Profil Dewan Komisaris dan Direksi.
2. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, nasabah dapat menghubungi **Call Center 1500 286** atau **150 286** serta melalui email **btncontactcenter@btn.co.id** atau **csd@btn.co.id**.
3. Layanan Permohonan Informasi Publik Perseroan melalui situs web **ppid.btn.co.id** dan/atau aplikasi android **BTN PPID** yang dapat diunduh melalui *smartphone* pengguna informasi.
4. Perseroan juga senantiasa menyampaikan laporan keterbukaan informasi dan/atau fakta material surat kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia serta melalui sistem pelaporan elektronik **spe.ojk.go.id** dan **idxnet.co.id** dan situs web **www.btn.co.id**.

- Informasi melalui media lainnya, antara lain media massa (Siaran Pers), majalah/buletin internal, poster dan *banner*.
- Penyampaian laporan kepada regulator, *Analyst Meeting*, konferensi pers, dan lain sebagainya. Selain itu, Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai Perseroan, masyarakat umum dan investor dapat menghubungi:

Sekretaris Perusahaan

Ramon Armando

Menara BTN Lt. 20

Jl. Gajah Mada No.1, Jakarta 10130

Telp: (021) 6336789 ext. 2003

Faks: (021) 6336719

Email: csd@btn.co.id

Investor Relations

Perseroan senantiasa menjalin hubungan yang harmonis dengan pemegang saham, investor potensial, analis maupun

masyarakat pasar modal lainnya dengan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan secara berkala seperti pertemuan dengan analis/investor dalam skala nasional maupun internasional serta paparan kinerja kepada publik. Perseroan juga memenuhi kewajiban keterbukaan informasi sebagaimana yang diatur dalam peraturan Pasar Modal seperti Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material, Laporan Keuangan, Laporan tahunan dan Laporan Pemegang Saham Tertentu.

Adapun kontak untuk *Investor Relations* Perseroan adalah sebagai berikut:

Investor Relations

Winang Budoyo

Menara BTN Lt. 16

Jl. Gajah Mada No. 1, Jakarta 10130

Telp : +62 21 63870107

Email : investor_relations@btn.co.id

Website : <https://www.btn.co.id/Investor-Relation-Home>

Profil Kepala *Investor Relations*



Winang Budoyo

Kepala *Investor Relations*

Warga Negara Indonesia, berusia 54 Tahun, berdomisili di Bekasi.



Riwayat Pendidikan

- S1 Sarjana Ekonomi – Universitas Indonesia
- S2 Master of Economic Studies – University of Queensland



Pengalaman Kerja

- Investor Relations & Research Division Head dan Chief Economist* BTN (2020 – saat ini)
- Investor Relations Department Head dan Chief Economist* BTN (2018 – 2020)



Dasar Hukum Pengangkatan

21/KUASA/DIR/2020 tanggal 28 April 2020

Tugas dan Tanggung Jawab *Investor Relations*

Pelaksanaan program komunikasi kepada komunitas pasar modal melalui paparan publik yang dilakukan secara berkala, maupun *on-demand*. *Investor Relations* secara aktif menyelenggarakan forum-forum pertemuan dengan analis, investor, *rating agency* dan komunitas pasar modal lainnya untuk menjamin keterbukaan informasi dapat dilaksanakan dengan baik. Adapun kewenangan dari *Investor Relations* sesuai dengan Kebijakan Khusus (KK) 9-AA adalah sebagai berikut:

- Mengelola seluruh aktivitas komunikasi dengan analis, investor dan komunitas pasar modal dalam rangka memberikan gambaran mengenai kinerja dan prospek perusahaan kepada para analis dan investor.
- Mengelola seluruh aktivitas komunikasi dengan analis dan investor, termasuk komunitas pasar modal mulai dari mengkomunikasikan kinerja Bank, mengembangkan citra yang sesuai hingga melakukan program komunikasi kepada komunitas pasar modal dalam rangka memberikan gambaran mengenai kinerja dan prospek perusahaan kepada para analis dan investor.

3. Memastikan kualitas data yang dikumpulkan terkait kinerja dan prospek usaha merupakan data yang valid serta akurat untuk dikomunikasikan kepada komunitas investor dan komunitas pasar modal guna mengoptimalkan investasi pada Perseroan. Mengelola dan memastikan aktivitas pengumpulan data secara akurat guna mendukung analisis dan pemodelan untuk mengoptimalkan investasi pada perusahaan.
4. Mengelola ketersediaan laporan terkait tanggapan investor, valuasi dan kinerja saham kepada Direksi untuk dapat menjadi masukan dalam penyusunan strategi bisnis dan keuangan perusahaan.
5. Mendukung pelaporan kepada regulator dalam rangka pemenuhan fungsi kepatuhan sesuai ketentuan yang berlaku.
6. Mengelola kegiatan pengelolaan komunikasi kinerja kepada publik, Investor, dan Pasar Modal.
7. Memastikan kualitas data yang dikomunikasikan dari sisi validitas, akurasi dan sumber informasi untuk memberikan informasi yang tepat terkait kinerja dan prospek perusahaan kepada investor serta optimalisasi investasi pada Perseroan.
8. Memberikan informasi secara proaktif kepada komunitas pasar modal dan mencari masukan mengenai hal-hal strategis.
9. Mengelola pengadaan Kegiatan Komunikasi Hubungan Investor dan pertemuan-pertemuan dengan pemangku kepentingan (*stakeholder*) lainnya terkait penyampaian informasi bisnis dan keuangan perusahaan dalam rangka memberikan prospek perusahaan kepada para investor dalam mengoptimalkan investasi pada Bank BTN.
10. Mempersiapkan materi presentasi kegiatan komunikasi Hubungan Investor.
11. Menyediakan data dan informasi mengenai kinerja Perseroan melalui situs web *Investor Relations* dalam rangka memberikan akses yang lebih mudah dan luas, di mana informasi yang disediakan antara lain:
 - a. Laporan keuangan bulanan dan triwulan, Laporan Rasio Kecukupan Likuiditas (LCR) Laporan pendanaan Stabil Bersih (NSFR), Laporan Eksposur Risiko dan Permodalan, Laporan Keuangan Entitas, dan Laporan Rasio Pengungkit sesuai dengan persyaratan OJK sebagai perusahaan perbankan di Indonesia.
 - b. Publikasi laporan keuangan konsolidasian setiap kuartal setiap kuartal dan diaudit untuk periode akhir tahun sesuai dengan persyaratan OJK sebagai Perusahaan publik serta materi presentasi Pertemuan Analis (*Analyst Meeting*).
 - c. Laporan Tahunan yang merupakan laporan komprehensif untuk umum dan pemangku kepentingan atas pencapaian kinerja, bisnis dan aktivitas lain Bank BTN.

Prinsip dasar yang digunakan oleh *Investor Relations* dalam berkomunikasi dengan komunitas pasar modal adalah:

1. Pengungkapan informasi dilakukan secara wajar (*fair disclosure information*) dengan memperhatikan prinsip kesetaraan (*equitable treatment*) dan transparansi.

2. Informasi diberikan dengan berpegang pada prinsip kehati-hatian dengan memperhatikan ketentuan kerahasiaan di bidang perbankan yang berlaku.

Metode paparan publik yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. *Direct*, yang meliputi: Rapat Umum Pemegang Saham, *Public Expose*, *Non Deal Roadshow*, *Investor Conference*, *Press Conference*, *1-on-1 Meetings*, *Group Meetings*, *Conference Call*, *Branch Visits* dan *Site Visits*.
2. *Indirect*, yang meliputi: *Annual Report*, Laporan Keuangan Publikasi, Materi Presentasi Korporasi, *Press Release*, *Website*, *Broadcast Media* (TV, Surat Kabar, Media Online), Sosial Media, dan *E-mail*.

Pelaksanaan Tugas Investor Relations

Pada Tahun 2023, aktivitas dan interaksi unit kerja *Investor Relations* yang melibatkan investor, analis, pemegang saham, lembaga pemeringkat serta pelaku pasar modal, sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Pertemuan Analis (*Analyst Meeting*) yang dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali dalam setahun.

Tanggal	Topik	Deskripsi
16 Februari 2023	<i>Analyst Meeting FY22 (audited)</i>	Video Conference Call
26 April 2023	<i>Analyst Meeting 1Q23 (unaudited)</i>	Video Conference Call
20 Juli 2023	<i>Analyst Meeting 1H23 (unaudited)</i>	Video Conference Call
27 November 2023	<i>Analyst Meeting 9M23 (limited review)</i>	Video Conference Call

2. Penyelenggaraan *Annual Review* dengan lembaga pemeringkat nasional dan Internasional sebanyak 3 (tiga) kali dalam setahun.

Tanggal	Lembaga Pemeringkat
17 Mei 2023	Pefindo
19 Oktober 2023	Fitch Ratings
29 November 2023	Moody's

3. Interaksi dan diskusi yang melibatkan investor dan analis, dan/ atau pemegang saham dalam bentuk *teleconference* maupun *in-house meeting* dalam setahun.

Tanggal	Kegiatan
3 Februari 2023	Mandiri Investment Forum
2 Maret 2023	KBSA Live Special Mirae Asset Sekuritas
31 Maret 2023	Meet the Company Rivan Kurniawan
31 Mei 2023	Local Non-Deal Roadshow BRI Danareksa Sekuritas
7 – 8 Juni 2023	Local Non-Deal Roadshow Mandiri Sekuritas
14 Juni 2023	Emiten Xtraordinary Bahana Sekuritas
15 Juni 2023	Meet & Greet CGS CIMB Sekuritas

Tanggal	Kegiatan
16 Juni 2023	<i>Emiten Talk Banking & Finance Series</i> Stockbit Sekuritas
5 Juli 2023	CuanTalks Podcast Ajaib Sekuritas
14 Juli 2023	<i>Non-Deal Roadshow</i> Australia Macquarie Indonesia Securities
24 – 28 Juli 2023	<i>Regional Non-Deal Roadshow to</i> Singapore, Hongkong and Kuala Lumpur Macquarie Indonesia Securities
1 Agustus 2023	UBS Indonesia <i>Banks Day</i> 2023
16 Agustus 2023	Emitalk BBTN Indo Premier Sekuritas
11 – 13 September 2023	Shanghai Indonesia <i>Corporate Day</i> Mandiri Sekuritas
11 – 14 September 2023	30 th CITIC CLSA Investors' Forum Hongkong
5 Oktober 2023	NgopiAren BNI Sekuritas
20 September 2023	SmartTalk RHB Sekuritas
27 September 2023	Yuanta <i>Regional Investment Forum</i> Yuanta Sekuritas
2 November 2023	Annual BCP <i>Investor Conference</i>
20 November 2023	Indonesia SMID <i>Cap Banks Corporate Day</i> Macquarie Sekuritas
6 – 8 Desember 2023	<i>Local Non-Deal Roadshow</i> bersama BRI Danareksa Sekuritas
13 Desember 2023	Webinar <i>Meet Your Company</i> bersama Mandiri Sekuritas

4. Penyelenggaraan *Public Expose* Tahunan Tahun 2023 pada tanggal 29 November 2023 melalui *Public Expose Live* 2023 bersama Bursa Efek Indonesia (IDX) dengan agenda Pemaparan Kinerja dan Konferensi Pers yang dihadiri oleh 997 peserta yang antara lain terdiri atas investor retail maupun institusi, pemegang saham, dan analis.

Sepanjang Tahun 2023, Perseroan telah memenuhi permintaan meeting baik *offline* maupun melalui *conference call* dari komunitas pasar modal, baik yang dilakukan bersama Direksi

maupun oleh Unit Investor Relations.

Partisipan	Jumlah Kegiatan
Analisis	72
Investor Lokal	65
Investor Asing	78
Rating Agency	3
Total	218

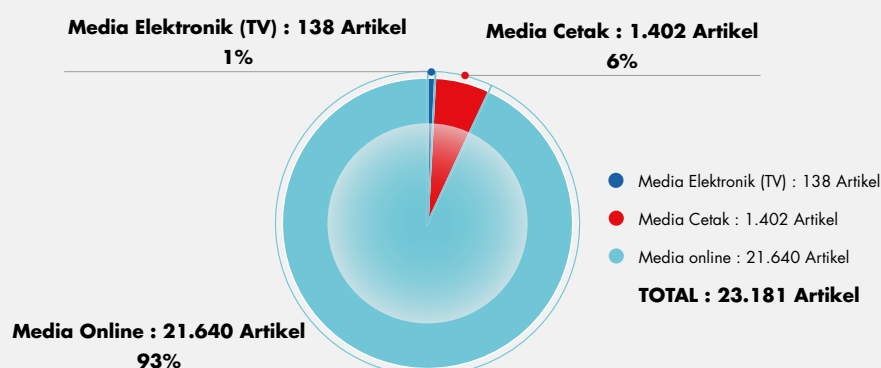
Unit Investor Relations secara berkala menyampaikan laporan perkembangan saham Perseroan, termasuk adanya pergerakan saham yang tidak biasa (*unusual market activities*) serta laporan terkait masukan, tanggapan dan harapan dari investor, analis dan komunitas pasar modal lainnya terhadap pengembangan bisnis dan perbaikan kinerja Perseroan.

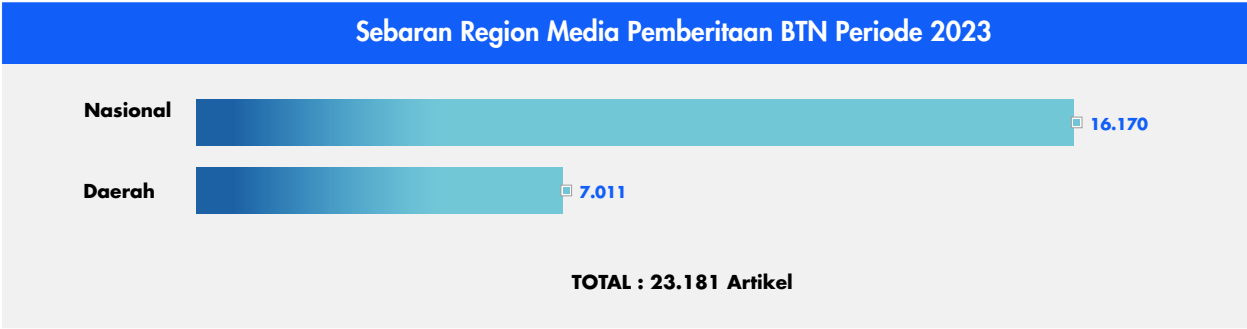
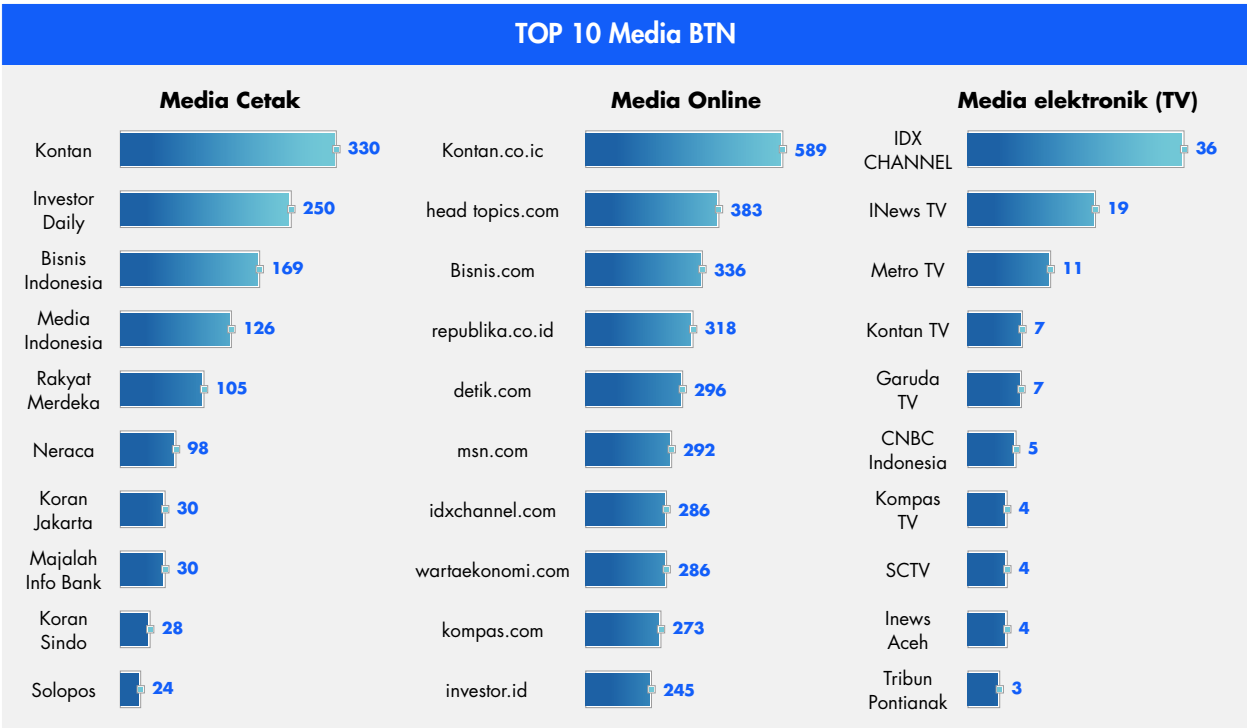
Media Eksposur

Selama periode Januari hingga 31 Desember 2023, Perseroan mendapatkan paparan pemberitaan yang luas dan positif di media massa, baik media cetak, *online*, maupun elektronik. Dalam setahun, Perseroan telah mendistribusikan 102 (seratus dua) *press release* ke media massa dan 85 (delapan puluh lima) berita foto resmi yang juga disebarluaskan ke media. Alhasil pada periode yang sama, Perseroan mendapatkan paparan pemberitaan yang tinggi, dimana ada lebih dari 23.181 total pemberitaan dimana 22.892 merupakan berita positif yang diangkat oleh media massa. Adapun dari total pemberitaan tersebut, sebesar 93% (sembilan puluh tiga persen) ditayangkan oleh media online antara lain kontan.co.id, headtopics.com, bisnis.com, dan republika.com.

Sebaran *region* pemberitaan media pemberitaan Perseroan didominasi oleh media pemberitaan nasional sebesar 16.170 berita.

Sebaran Kategori Media Pemberitaan BTN





Siaran Pers

No	Tanggal	Judul
1	5 Januari 2023	Rights Issue BTN Oversubscribed 1,6 Kali
2	8 Januari 2023	Rights Issue BTN Sukses, Ini Kata Analisis
3	11 Januari 2023	Diangkat Kembali Jadi Direksi BTN Andi Nirwoto Berada Dibalik Sukses Transformasi Digital Banking BTN
4	11 Januari 2023	RUPS Setujui Pengunduran Diri Heru Budi Hartono sebagai Komisaris Bank BTN 2022 Back on Track dan Optimisme Sambut 2023
5	16 Januari 2023	Semarak HUT ke-73, BTN Gelar Anugerah Jurnalistik dan Foto
6	18 Januari 2023	2023, BTN SYARIAH GENCAR BUKA CABANG
7	19 Januari 2023	Bank BTN Resmi Membuka Kantor Cabang Pembantu di Kabupaten Poso
8	20 Januari 2023	Ekosistem Perumahan Jadi Andalan Super Apps BTN
9	26 Januari 2023	Dukung Zero Backlog Perumahan di 2045, Ini Langkah Strategis Usulan Bank BTN
10	27 Januari 2023	Menteri Keuangan Mendukung Langkah BTN Menjadi Kebanggaan Indonesia

No	Tanggal	Judul
11	31 Januari 2023	Raih Indonesia Top 3 PLCs dan ASEAN Asset Class Impelementasi GCG Bank BTN Dapat Pengakuan di ASEAN
12	2 Februari 2023	LEWAT BTN SOLUSI, GILIRAN AWAK GRAMEDIA BISA PUNYA RUMAH
13	3 Februari 2023	Nasabah BTN Prioritas Bantu Wujudkan Masyarakat Miliki Rumah Impian
14	7 Februari 2023	Rayakan HUT KE-73, BTN TEBAR DISKON. CATAT TANGGALNYA DAN CEK MERCHANTNYA SEKARANG
15	9 Februari 2023	73 Tahun Bakti BTN Untuk Rumah Indonesia
16	12 Februari 2023	BTN Resmi Luncurkan BTN Mobile
17	14 Februari 2023	GARAP POTENSI BISNIS SYARIAH DI PONTIANAK, BTN BUKA KANTOR CABANG
18	14 Februari 2023	GENAP BERUSIA 18 TAHUN BTN SYARIAH TETAP FOKUS DUKUNG PROGRAM RUMAH NASIONAL
19	16 Februari 2023	2022, BTN BUKUKAN LABA RP3,04 TRILIUN
20	Februari 2023	LABA BTN SYARIAH MELESAT HAMPIR DUA KALI LIPAT
21	17 Februari 2023	Bank BTN Dukung Program Belanja Produk UMKM
22	27 Februari 2023	BTN Syariah Siap Ekspansi Pembiayaan Rumah di Aceh
23	6 Maret 2023	KOLABORASI BTN DAN RELAWAN BAKTI BUMN TEKAN STUNTING DI DESA KOLBANO, NTT
24	7 Maret 2023	BTN DORONG DIGITALISASI PASAR TRADISIONAL
25	12 Maret 2023	BTN SALURKAN RATUSAN JUTA UNTUK TEKAN STUNTING DI KOLBANO
26	17 Maret 2023	BTN Himbau Nasabah Jaga Kerahasiaan Data
27	19 Maret 2023	Pengguna Aktif BTN Mobile Melonjak
28	19 Maret 2023	BTN Ganti Dana Jika Nasabah Tidak Terlibat Fraud
29	20 Maret 2023	Kini Distributor Semen Indonesia, Dapat Manfaatkan Layanan Perbankan BTN
30	24 Maret 2023	BTN Optimistis Tahun 2023 Kinerja Makin Gemilang
31	27 Maret 2023	POTENSI TINGGI, BTN AMBON TAWARKAN BUNDLING PAKET WIRAUUSAHA DAN KREDIT RINGAN PEGAWAI
32	5 April 2023	Dorong Kinerja Bisnis, BTN Syariah Gandeng Universitas Muhammadiyah Makassar
33	8 April 2023	BTN Gelar Road Show Tabungan Bisnis di Pasar Tanah Abang Jakarta
34	10 April 2023	SAMBUT LIBUR LEBARAN, BTN SIAPKAN DANA TUNAI RP26 TRILIUN
35	12 April 2023	BTN RILIS PROGRAM THR MUDIK
36	14 April 2023	RAMON ARMANDO DITUNJUK SEBAGAI CORPORATE SECRETARY BTN
37	18 April 2023	Tebar Berkah #RamadanDariHati, Dompot Dhuafa dan BTN Syariah Berkolaborasi Muliakan Anak Yatim
38	18 April 2023	BTN dan Insan Pers Berbagi Paket Sembak
39	26 April 2023	KREDIT DAN PEMBIAYAAN BANK BTN TEMBUS RP300 TRILIUN
40	27 April 2023	Laba Bersih BTN Syariah Melonjak 40%
41	3 Mei 2023	BANK BTN TAMBAH NOMOR CONTACT CENTER BARU 150286
42	18 Mei 2023	Layanan BTN Syariah Dinilai Memuaskan Ini Faktanya
43	31 Mei 2023	Bank BTN Berkomitmen Selesaikan Sertifikat Bermasalah
44	31 Mei 2023	Dorong Pertumbuhan Ekonomi, BTN Siap Gelar Akad Massal 10.000 Unit KPR Dalam Satu Hari
45	7 Juni 2023	Sah! OJK Restui Nixon LP Napitupulu Menjadi Dirut BTN
46	10 Juni 2023	CETAK SEJARAH, BTN RAIH PERINGKAT TERTINGGI PEFINDO
47	13 Juni 2023	BTN MOBILE PERMUDAH TRANSAKSI VALAS
48	16 Juni 2023	Dongkrak Market Share KPR Non Subsidi, BTN Resmikan Sales Center KPR
49	21 Juni 2023	Perayaan Satu Tahun PLUS by BTN Prioritas Gelar Roadshow di Medan
50	21 Juni 2023	ATM Dibobol, BTN Pastikan Tidak Ada Uang yang Hilang

No	Tanggal	Judul
51	22 Juni 2023	KEREN! BTN SYARIAH SABET THE BEST ISLAMIC PROJECT FINANCE HOUSE 2023 DARI EUROMONEY
52	23 Juni 2023	HUT DKI Jakarta, BTN Jakarta Run 2023 Siap Digelar
53	23 Juni 2023	JADI THE BEST MORTGAGE BANK IN SOUTH EAST ASIA, BTN BIDIK DANA MURAH RP270 TRILIUN PADA 2025
54	28 June 2023	Bank BTN Raih Penghargaan FinanceAsia 23rd Best Companies in Asia Award
55	9 Juli 2023	Pelayanan Satpam BTN Syariah Dinilai Memuaskan, Ini Salah Satu Kuncinya
56	17 Juli 2023	BTN BUKA KANTOR CABANG PEMBANTU DI SOREANG
57	17 Juli 2023	BTN DUKUNG INKLUSI FINANSIAL DI DESA WISATA BALIGE
58	20 Juli 2023	BANK BTN DORONG EKONOMI NTT
59	20 Juli 2023	BTN JAKARTA RUN 2023 RESMI DIBUKA BESOK
60	21 Juli 2023	TAK MAU KALAH DENGAN INDUK, LABA UUS BTN MELONJAK HAMPIR 50%
61	24 Juli 2023	BTN MOBILE JADI LEBIH LENGKAP DENGAN FITUR MENU INSTAN
62	25 Juli 2023	BTN SYARIAH DUKUNG PEMBIAYAAN RUMAH BAGI WARGA MUHAMMADIYAH
63	26 Juli 2023	BTN PRIORITAS SABET ASEAN BANKING & FINANCE AWARD
64	28 Juli 2023	BTN Syariah Ditargetkan Jadi BUS Akhir Tahun ini
65	31 Juli 2023	RAIH PENGHARGAAN INTERNASIONAL, BTN DINOBATKAN JADI BEST SAVINGS BANK INDONESIA 2023 DI INGGRIS
66	4 Agustus 2023	RILIS PROGRAM BARU, BTN MOBILE MAKIN DIMINATI MASYARAKAT
67	10 Agustus 2023	Ekspansi BTN Solusi, Bank BTN Bidik 22.000 Karyawan Gramedia
68	11 Agustus 2023	BTN Gandeng UGM Ajak Mahasiswa Jadi Entrepreneur
69	19 Agustus 2023	IMPLEMENTASI BRANCH TRANSFORMATION BERDAMPAK POSITIF PADA PRODUKTIFITAS DAN EFISIENSI BTN
70	24 Agustus 2023	Bank BTN Melirik Beberapa Bank untuk Menjadi Target Akuisisi Guna Mendukung Spin Off Unit Usaha Syariah
71	24 Agustus 2023	Diduga Lakukan Upaya Pembobolan Bank, Bank BTN Siap Laporkan AH ke Kepolisian
72	25 Agustus 2023	Bank BTN Luncurkan KPR BTN Prioritas
73	29 Agustus 2023	Bank BTN Ajak Mahasiswa Lahirkan Inovasi Digital Mortgage
74	31 Agustus 2023	Nixon LP Napitupulu: Rumah is The One Solution Dimonetisasi Pembangunan Infrastruktur
75	6 September 2023	Dorong Optimalisasi Pelayanan Nasabah, IFG Life dan BTN Jalin Kerjasama Bancassurance
76	9 September 2023	Erick Thohir Apresiasi Bank BTN Sediakan Rumah Bagi Atlet Sepakbola
77	14 September 2023	Bank BTN Bagikan Mobil Listrik untuk Nasabah Loyal
78	15 September 2023	Agustus 2023, Kredit BTN Naik Hampir Double Digit
79	21 September 2023	Ramaikan China ASEAN EXPO 2023 (upper) Bank BTN Pasarkan Produk UMKM ke China
80	21 September 2023	HAI GEN Z, MAU PUNYA RUMAH? SIMAK SKEMA KPR BTN UNTUK USIA MULAI 21 TAHUN
81	26 September 2023	CSR Bank BTN Raih Penghargaan Internasional
82	5 Oktober 2023	Berkat Transformasi, Bank BTN Sabet Penghargaan The Asian Experience Awards 2023
83	6 Oktober 2023	Dari Cari Rumah Hingga Ajukan KPR, Cukup Akses Super Apps BTN Mobile
84	13 Oktober 2023	Siap Jadi yang Terbesar, Bank BTN Dorong Milenial Aceh Terjun ke Bisnis Perumahan
85	13 Oktober 2023	BTN Syariah Siap Jadi Bank Terbesar di Aceh
86	19 Oktober 2023	Dorong Produktivitas, Bank BTN Fokus Jaga Kesehatan Mental Pegawai
87	23 Oktober 2023	ATASI BACKLOG PEMERINTAH HARUS SEGERA TERBITKAN UU UNTUK RUMAH RAKYAT – Pitching News
88	25 Oktober 2023	BTN SAMBUT POSITIF STIMULUS BEBAS PPN PROPERTI
89	28 Oktober 2023	Libatkan Santri Atasi Backlog, Bank BTN Edukasi Santri Jadi Developer

No	Tanggal	Judul
90	1 November 2023	Jumlah Pendaftar Membludak, BTN Resmi Menutup Pendaftaran BTN Jakarta Run 2023
91	5 November 2023	Pelari dari 21 Negara Meriahkan BTN Jakarta Run 2023
92	23 November 2023	BTN OPTIMISTIS KPR DI 2024 TUMBUH LEBIH TINGGI
93	24 November 2023	Bank BTN Sasar Ribuan Keluarga Baru dengan Wedding Festival dan Pameran Perumahan
94	27 November 2023	LABA BTN SYARIAH MEROKET DIATAS 70%
95	28 November 2023	Rencana Akuisisi Bank Syariah, BTN Incar Lebih Banyak Dana Murah
96	28 November 2023	BTN Optimistis Insentif Properti Picu Pertumbuhan KPR
97	29 November 2023	KUARTAL III/2023, LABA BANK BTN ONTRACK
98	6 Desember 2023	BANK BTN GANDENG MCI BENTUK BTN FUND
99	14 Desember 2023	Sambut Libur Natal dan Tahun Baru Bank BTN Siapkan Uang Tunai Rp19,68 Triliun
100	18 Desember 2023	47 Tahun Salurkan KPR, Bank BTN Wujudkan Mimpi 5,6 Juta Masyarakat Indonesia Miliki Rumah
101	18 Desember 2023	BBTN PROSPEK 2024
102	18 Desember 2023	Sambut Tahun Baru, BTN Hadirkan 4 Fitur Anyar pada BTN Mobile

Buletin



Edisi I tahun 2023



Edisi II tahun 2023



Edisi III tahun 2023



Edisi IV tahun 2023

Transparansi Penyampaian Laporan

Perseroan memenuhi kewajiban kepada Pemangku Kepentingan dan OJK sesuai ketentuan, di antaranya terkait transparansi dan publikasi kondisi keuangan dan non keuangan serta informasi lainnya yang bertujuan untuk mendukung keterbukaan informasi, edukasi keuangan dan layanan kepada masyarakat. Perseroan mengungkapkan sistem dan prosedur untuk memastikan bahwa laporan keuangan interim yang diaudit oleh auditor eksternal secara material adalah akurat, lengkap, dan memberikan investor informasi untuk membuat keputusan investasi.

Literasi dan Inklusi Keuangan Bank

- Laporan Pelaksanaan Kegiatan Literasi dan Inklusi Keuangan tahun 2023: dilaporkan setiap triwulan (Maret, Juni, September, Desember).
- Laporan Perencanaan Kegiatan Literasi dan Inklusi Keuangan tahun 2024: dilaporkan pada November 2023.

Berbagai kegiatan Literasi dan Inklusi Keuangan yang telah dilaporkan kepada regulator (BI dan OJK) sebagai berikut:

- Literasi Keuangan Tahun 2023

No.	Stream	Cakupan	Nama Kegiatan	Periode		Frekuensi
				Mulai	Akhir	
1.	<i>Funding</i>	Edukasi Keuangan	Talkshow Entrepreneurship Dengan Bintang Tamu Alan Budi Kusuma dan Susi Susanti	23/01/2023	29/01/2023	1 Kali
2.	<i>Lending</i>	Edukasi Keuangan	<i>Marketing dan Developer Gethering</i>	04/05/2023	04/05/2023	1 Kali
3.	<i>Digital</i>	Edukasi Keuangan	Edukasi ke Nasabah Tentang Keamanan Informasi	01/07/2023	31/12/2023	1 Kali
4.	<i>Inklusi</i>	Edukasi Keuangan	Program SIMOLEK (Jawa Barat)	27/07/2023	30/09/2023	1 Kali
5.	<i>Inklusi</i>	Edukasi Keuangan	Program SIMOLEK (Kupang, Surabaya, Denpasar, Malang, Mataram, Bangkalan, Madiun, Jember, Kediri, Singaraja, Banyuwangi)	09/08/2023	08/09/2023	1 Kali
6.	<i>Inklusi</i>	Edukasi Keuangan	Program SIMOLEK (Makassar, Palangkaraya, Gorontalo)	01/08/2023	09/08/2023	1 Kali
7.	<i>Funding</i>	Edukasi Keuangan	Sosialisasi Wakaf Uang di Lingkungan Pendidikan	01/08/2023	20/12/2023	1 Kali
8.	<i>communication & partnerships</i>	Edukasi Keuangan	SRIKANDI Goes to Campus	14/08/2023	14/08/2023	1 Kali
9.	<i>Funding</i>	Edukasi Keuangan	BTN Market Beat September 2023	16/09/2023	16/09/2023	1 Kali
10.	<i>Lending</i>	Edukasi Keuangan	Sosialisasi Program KPR Subsidi	19/10/2023	19/10/2023	1 Kali
11.	<i>Lending</i>	Edukasi Keuangan	Pendidikan dan pelatihan kepada Developer muda bekerja sama dengan HFC (Santri Developer & Developer Milenial)	28/10/2023	28/10/2023	1 Kali
12.	<i>Lending</i>	Edukasi Keuangan	Pelatihan dan Pemberdayaan masyarakat untuk menjadi entrepreneur melalui Business Camp Bank BTN	09/11/2023	09/11/2023	1 Kali
13.	<i>Lending</i>	Edukasi Keuangan	Literasi Keuangan Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pemegang Jepang	14/12/2023	14/12/2023	1 Kali

- Inklusi Keuangan Tahun 2023

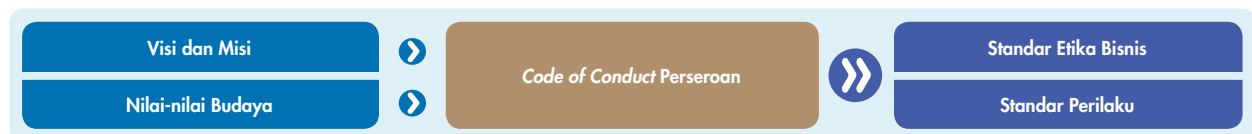
No.	Stream	Cakupan	Nama Kegiatan	Periode		Frekuensi
				Mulai	Akhir	
1.	Digital	Perluasan Akses	Launching Super Apps BTN Mobile	09/02/2023	31/05/2023	1 Kali
2.	Reporting	Penyediaan Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan	Peningkatan Layanan BTN Call 150286 7 1500285	03/05/2023	03/05/2023	1 Kali
3.	Lending	Perluasan Akses	Peresmian Sales Center KPR BTN untuk Meningkatkan Market Share	16/06/2023	16/06/2023	1 Kali
4.	Lending	Penyediaan Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan	Akad KPR Massal 10.000 Unit di Perumahan Puri Deta Tigaraksa	08/08/2023	08/08/2023	1 Kali
5.	Lending	Penyediaan Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan	Penigkatan Penyaluran KPR Untuk Sektor Syariah dan Olahraga	09/09/2023	26/09/2023	1 Kali
6.	Funding	Penyediaan Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan	Roadshow Tabungan BTN Bisnis Bersama Alan Budi Kusuma dan Direktur Distribution Funding	23/09/2023	23/09/2023	1 Kali
7.	Digital	Perluasan Akses	Penambahan Fitur Pembayaran BI-FAST dan Lainnya Pada BTN Mobile (Mobile Banking)	01/01/2023	31/12/2023	1 Kali
8.	Lending	Penyediaan Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan	Kegiatan BTN Preneur Berupa Bazaar UMKM Binaa Bank BTN	01/01/2023	31/12/2023	2 Kali
9.	Inklusi	Perluasan Akses	Pembukaan Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu (Konvensional dan Syariah)	01/01/2023	31/12/2023	19 Kali
10.	Inklusi	Perluasan Akses	Penambahan Mobil Kas Keliling (BTN Move) Pada Tahun 2023 untuk Penigkatan Ketersediaan Akses Produk dan Layanan Bank BTN	01/01/2023	31/12/2023	8 Kali
11.	Funding	Penyediaan Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan	Gathering untuk meningkatkan penggunaan produk SBN Perdana	10/07/2023	10/07/2023	2 Kali

Kode Etik

Kode Etik atau *Code of Conduct* merupakan perwujudan komitmen Perseroan untuk memastikan penerapan GCG dengan standar tinggi yang mengacu kepada *best practice* lembaga perbankan yang kredibel dan terpercaya. Kredibilitas serta kepercayaan publik, pemegang saham, dan nasabah merupakan faktor yang sangat menentukan bagi perkembangan dan kelangsungan usaha Perseroan. Aktivitas usaha yang dijalankan Perseroan harus mematuhi peraturan dan perundangan yang berlaku serta menjunjung tinggi norma dan etika. Kesadaran menjalankan etika yang baik akan meningkatkan dan memperkuat citra positif Perseroan dan mewujudkan Perseroan sebagai *Good Corporate Citizen*. Karena itu, Perseroan senantiasa menjunjung tinggi integritas dengan memiliki dan menerapkan pedoman etika dan perilaku yang menjadi dasar sikap dan tindakan seluruh insan Perseroan agar bekerja secara profesional dan beretika dengan menggunakan prinsip-prinsip dasar yang mengacu kepada visi, misi, dan nilai-nilai serta regulasi internal dan eksternal yang berlaku. Kode etik dikomunikasikan secara efektif kepada Direksi, Dewan Komisaris, serta seluruh karyawan. Selain itu, kode etik diintegrasikan ke dalam strategi dan operasi Perseroan termasuk sistem manajemen risiko dan struktur remunerasi, serta ditegakkan.

Visi, Misi dan Nilai-nilai Budaya Perseroan Sebagai Fondasi Kode Etik

Perseroan telah merumuskan beberapa perangkat kebijakan yang menjadi pedoman beretika dan berperilaku bagi setiap elemen Perseroan dalam kegiatan bisnis yang dijalankan. Perseroan mengupayakan penerapan standar etika dan perilaku dalam menjalankan segenap aktivitas bisnisnya sesuai dengan visi, misi, dan nilai-nilai budaya yang dimiliki melalui implementasi *Code of Conduct*.



Visi

Menjadi *The Best Mortgage Bank in Southeast Asia* pada tahun 2025

Misi

1. Secara aktif mendukung pemerintah dalam memajukan kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui kepemilikan rumah.
2. Mewujudkan kehidupan yang diimpikan jutaan rakyat Indonesia melalui penyediaan rumah yang layak.
3. Menjadi *one of home of Indonesia's best talent*.
4. Meningkatkan *shareholder value* dengan berfokus pada pertumbuhan profitabilitas yang berkelanjutan sebagai perusahaan *blue chip* dengan prinsip manajemen risiko yang kokoh.
5. Menjadi mitra keuangan bagi para pemangku kepentingan dalam ekosistem perumahan dengan menyediakan solusi menyeluruh dan layanan terbaik melalui inovasi digital.

Nilai-nilai Budaya Perseroan

Nilai-nilai budaya, tercermin dalam budaya AKHLAK sebagai nilai-nilai utama Perseroan dan 18 panduan perilaku utama sebagai berikut:

Nilai Budaya	Perilaku Utama
 A Amanah Memegang teguh kepercayaan yang diberikan	• Memenuhi janji dan komitmen; • Bertanggung jawab atas keputusan, tugas dan tindakan yang dilakukan; • Berpegang teguh kepada nilai moral dan etika.
 K Kompeten Terus belajar mengembangkan kapabilitas	• Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah; • Membantu orang lain belajar; • Menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik.
 H Harmonis Saling peduli dan menghargai perbedaan	• Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya; • Suka menolong orang lain; • Membangun lingkungan kerja yang kondusif.
 L Loyal Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara	• Menjaga nama baik sesama pegawai, pimpinan, BUMN dan Negara; • Rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar; • Patuh kepada Pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika.
 A Adaptif Terus berinovasi dan antusias dalam mengerjakan ataupun menghadapi perubahan	• Cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik; • Terus menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi; • Bertindak proaktif.
 K Kolaboratif Membangun kerja sama yang sinergi	• Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi; • Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah; • Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

Pokok-Pokok Kode Etik (Code of Conduct)

Code of Conduct berisi standar etika dan perilaku bagi Perseroan sebagai sebuah entitas bisnis beserta seluruh elemennya dalam berinteraksi baik secara internal maupun secara eksternal kepada berbagai pihak yang berkepentingan. Penerapan *Code of Conduct* bertujuan untuk mewujudkan terciptanya perilaku ideal yang berkembang menjadi budaya kerja berdasarkan nilai-nilai luhur yang diyakini jajaran Perseroan. *Code of Conduct* terangkum ke dalam 4 Bab yang dijabarkan secara singkat sebagai berikut:

01. Pendahuluan	<i>Code of Conduct</i> ini merupakan kodifikasi atau kompilasi kebijakan, peraturan pegawai, dan kesepakatan yang telah dibangun bersama antara Perseroan dengan pegawai yang akan mempengaruhi, membentuk, dan menetapkan standar tingkah laku, baik bagi Pengurus maupun pegawai dalam menjalankan segenap aktifitas bisnis. Implementasi <i>Code of Conduct</i>, baik kepatuhan ataupun ketidakpatuhannya menjadi salah satu aspek penilaian kinerja pegawai. Oleh karena itu, <i>Code of Conduct</i> ini akan selalu dijadikan pedoman dalam penyusunan kebijakan, manual/prosedur maupun praktek-praktek manajemen yang ada pada Perseroan. Penerapan <i>Code of Conduct</i> yang konsisten akan menunjukkan bahwa Perseroan menjunjung tinggi nilai-nilai bisnis yang luhur dan etika dalam menjalankan usaha, sekaligus dalam rangka menegakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan.
02. Standar Etika Bisnis	- Etika Bank dengan Pegawai Adanya Keadilan perlakuan terhadap pegawai, kedisiplinan pegawai, serta adanya larangan keterlibatan pegawai dalam aktivitas bisnis surat berharga Bank. - Etika Bank dengan Nasabah Bank mengutamakan kepuasan dan kepercayaan nasabah dan pegawai wajib mendukung Bank dalam upaya untuk mencapai kepuasan nasabah. - Etika Bank dengan penyedia barang dan jasa Pemilihan penyedia barang dan jasa harus didasari atas penilaian kemampuan, prestasi, dan berdasarkan kepatuhan serta objektivitas di bidang standar harga, kualitas, ketersediaan, persyaratan serta pelayanan yang diberikan oleh rekanan/pemasok - Etika Bank dengan Pesaing Bank menempatkan pesaing sebagai pendorong peningkatan kinerja secara berkesinambungan - Etika Bank dengan Mitra Kerja Bank menjunjung tinggi sikap saling percaya dan menghargai, serta menjunjung tinggi kebersamaan dengan mitra kerja sesuai dengan kaidah-kaidah bisnis yang berlaku.
	- Etika Bank dengan Pemerintah Bank berkomitmen mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. - Etika Bank dengan Masyarakat Bank berkomitmen untuk memberikan kontribusi positif dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial dengan menitikberatkan pada keseimbangan terhadap aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. - Etika Bank dengan Media Massa Bank menjadikan media masa sebagai mitra kerja dan media dalam melakukan promosi dalam rangka membangun citra yang baik. - Etika Bank dengan Organisasi Profesi Bank membina hubungan kerja sama yang baik dengan organisasi profesi dan regulasi dalam rangka sharing informasi, pengalaman dan berdiskusi tentang perkembangan bisnis, serta mencari solusi terbaik dalam menyelesaikan permasalahan yang menjadi kepentingan bersama.
03. Kebijakan Standar Prilaku	- Pegawai senantiasa menghindari kondisi, situasi ataupun kesan adanya benturan kepentingan dan penyalahgunaan jabatan. - Setiap anggota Komisaris dan Direksi serta pegawai Bank dilarang memberikan dan Menerima sesuatu untuk kepentingannya baik langsung ataupun tidak langsung, dari mitra bisnis yang dapat mempengaruhi keputusan. - Organ perusahaan dan pegawai Bank harus melaksanakan peraturan perundangan-Undangan dan peraturan Bank.
04. Penerapan dan Penegakan	Setiap pegawai Bank harus melaporkan setiap fakta penyimpangan <i>Corporate Code of Conduct</i> kepada <i>Human Capital Manajemen & Culture Specialist Division</i> dan identitas pelapor dilindungi. <i>Human Capital Manajemen & Culture Specialist Division</i> menindaklanjuti setiap laporan dan menyampaikan hasil kajiannya kepada Direksi dan/atau Komisaris sesuai dengan lingkup tanggung jawabnya. Pada akhirnya Direksi dan Komisaris memutuskan pemberian tindakan pembinaan, sanksi disiplin dan/atau tindakan perbaikan serta pencegahan yang harus dilaksanakan oleh atasan langsung di lingkungan masing-masing.

Kepatuhan Terhadap Kode Etik

Code of Conduct berlaku bagi Dewan Komisaris, Direksi serta Pegawai dalam menjalankan setiap aktivitas bisnis Perseroan dan melakukan interaksi antara Komisaris, Direksi dan Pegawai dengan seluruh *stakeholders*. Pernyataan pemberlakuan *Code of Conduct* bagi seluruh level organisasi dituangkan secara resmi melalui Peraturan Direksi No. 16/PD/CMPD/2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Pedoman Etika Bisnis dan Perilaku. Perseroan mewajibkan penandatanganan pernyataan sikap Insan Perseroan terhadap *Code of Conduct* yang disebut Pakta Integritas untuk selanjutnya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Keberhasilan penerapan *Code of Conduct* merupakan tanggung jawab dari seluruh pimpinan di lingkungan unit kerja masing-masing. Untuk itu, segenap pimpinan unit dituntut untuk memberikan pemahaman terkait penerapan *Code of Conduct* kepada pegawai di lingkungan unit kerja masing-masing.

Bentuk Sosialisasi Kode Etik dan Upaya Penegakannya

Code of Conduct disosialisasikan dan dapat diakses oleh seluruh insan Perseroan melalui **media Digital Room for E-leArning Modules (DREAM)** serta diselenggarakan kuis tentang *Code of Conduct* untuk mengetahui pemahaman pegawai terhadap *Code of Conduct*. Komitmen terhadap pelaksanaan *Code of Conduct* juga dituangkan dalam Pakta Integritas yang wajib ditandatangani oleh seluruh Direksi, Dewan Komisaris dan Pegawai Perseroan. Di samping itu, *Code of Conduct* juga dapat diakses oleh seluruh *Stakeholder* Perseroan melalui website Perseroan.

Upaya Penerapan dan Penegakan Kode Etik

Perseroan memberikan sanksi yang tegas dan konsisten terhadap pelanggaran Pedoman *Code of Conduct*. Upaya Penerapan dan Penegakan Kode Etik tercantum pada Kebijakan Khusus Nomor KK.3-C Tentang Regulasi dan Administrasi Kepegawaian. Bentuk penegakan pelanggaran yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dan Direksi beserta sanksinya berpedoman pada Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan RUPS. Sedangkan pengenaan sanksi terhadap pegawai dilakukan sesuai dengan aturan kepegawaian yang berlaku. Sepanjang tahun 2023, upaya-upaya yang dilakukan Perseroan dalam menerapkan dan menegakkan *Code of Conduct* antara lain:

1. Pengisian dan Penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh pegawai sesuai nilai-nilai *Code of Conduct*;
2. Internalisasi *Code of Conduct*, Pengendalian Gratifikasi dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) kepada seluruh Pegawai melalui Digital Room for E-leArning Modules (DREAM);
3. Bekerja sama dengan KPK melalui program Profesional Berintegritas (PROFIT) yang di dalamnya mencakup dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten membangun

integritas dalam mengawal pencegahan korupsi di lingkungan Perseroan melalui keikutsertaan training sebagai Ahli Pembangun Integritas (API) dan sertifikasi Penyuluh Anti Korupsi (PAKSI) serta keikutsertaan kolaborasi kampanye dengan KPK tentang pencegahan korupsi melalui berbagai saluran media komunikasi;

4. Melaksanakan Program Pengendalian Gratifikasi sesuai Rencana Kerja yang ditetapkan serta melaporkan implementasinya kepada KPK secara periodik per semester;
5. Mengelola laporan penerimaan gratifikasi dari seluruh unit kerja dan melaporkan kepada KPK sesuai ketentuan;
6. Melaksanakan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016 sebagai salah satu bentuk pelaksanaan dari Etika Bisnis dan Perilaku yang tercantum dalam *Code of Conduct*;
7. Melaksanakan program *Whistleblowing System* (WBS);
8. *Punishment* bagi pegawai yang melanggar etika bisnis;
9. Upaya Penerapan dan Penegakan *Code Of Conduct* lainnya.

Jenis Sanksi Pelanggaran Kode Etik

Perseroan menetapkan jenis sanksi untuk setiap pelanggaran *Code of Conduct* dalam dua jenis sanksi sebagai berikut:

1. Sanksi administratif

Kategori Sanksi	Jenis Sanksi	Sanksi	Masa Pembinaan
Sanksi Ringan	Ringan Huruf A	Teguran lisan	3 (tiga) bulan
	Ringan Huruf B	Teguran tertulis	
	Ringan Huruf C	Pernyataan tidak puas	
Sanksi Sedang	Sedang Huruf A	Tidak mendapatkan uang cuti	1 (satu) tahun
	Sedang Huruf B	Tidak mendapatkan penyesuaian gaji berkala	
	Sedang Huruf C	Penurunan <i>Person Grade</i> sebanyak 1 (satu) <i>grade</i> (gaji dasar menyesuaikan)	
Sanksi Berat	Berat Huruf A	Penurunan <i>person grade</i> sebanyak minimal 2 (dua) <i>grade</i> (gaji dasar menyesuaikan)	2 (dua) tahun
	Berat Huruf B	Pemutusan hubungan kerja (PHK)	
	Berat Huruf C	Pemutusan hubungan kerja dan dilaporkan kepada pihak yang berwajib.	

2. Sanksi Finansial

Sanksi finansial yaitu mengganti segala kerugian finansial yang timbul sebagai akibat dari pelanggaran disiplin yang dilakukannya.

Jumlah Pelanggaran dan Sanksi yang Diberikan

No	Kategori Sanksi	Jenis Sanksi	Jumlah Pegawai						Total Pegawai
			Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	Sanksi Ringan	Ringan Huruf A	22	23	27	14	9	11	106
		Ringan Huruf B	31	15	19	28	5	15	113
		Ringan Huruf C	24	25	47	35	6	11	148
2	Sanksi Sedang	Sedang Huruf A	18	69	62	54	8	15	226
		Sedang Huruf B	13	53	32	21	10	12	141
		Sedang Huruf C	9	45	31	16	9	10	120
3	Sanksi Berat	Berat Huruf A	2	5	10	5	3	1	26
		Berat Huruf B	22	40	24	19	42	43	190
		Berat Huruf C	0	0	6	3	3	1	13
	TOTAL		141	275	258	195	95	119	1,083

Kebijakan Pemberian Kompensasi Jangka Panjang Berbasis Kinerja Kepada Manajemen

Kompensasi jangka panjang berbasis kinerja kepada manajemen dilakukan dalam bentuk 2 (dua) program yang diberikan dalam bentuk saham Perseroan yaitu:

1. *Long Term Incentive* (LTI);
2. Bonus Jangka Panjang.

Bonus Jangka Panjang merupakan lanjutan dari program LTI dimana pada tahun 2023 dilaksanakan program Bonus Jangka Panjang untuk pegawai di level manajerial atau pegawai yang menduduki jabatan strategis yang dilakukan *locked up* selama maksimal 3 (tiga) tahun sampai dengan 2026. Adapun anggaran untuk program Bonus Jangka Panjang tahun 2023 yaitu Rp100 miliar yang diberikan ke pegawai dalam bentuk saham Perseroan. Sedangkan *Long Term Incentive* (LTI) merupakan program sejak tahun 2020 yang diberikan dalam 3 (tiga) *vesting* yaitu tahun *vesting* 1 di tahun 2020, *vesting* 2 di tahun 2021 dan *vesting* 3 di tahun 2022, di mana masing-masing *vesting* dilakukan masa penguncian saham (*locked up period*) selama 3 (tiga) tahun.

Latar belakang pemberian program *Long Term Incentive* (LTI) maupun bonus jangka panjang kepada pegawai khususnya di level manajerial antara lain sebagai berikut:

1. Sebagai *long term performance*, yaitu untuk mendorong kinerja yang bersifat ke masa depan dan jangka panjang.
2. Menjaga motivasi pegawai untuk dapat memberikan kontribusi positif melampaui target yang ditetapkan perusahaan.

3. LTI merupakan program *rewards* yang sangat umum digunakan dalam industri untuk mendukung pencapaian kinerja perusahaan secara jangka panjang.

Pegawai yang mendapatkan LTI adalah pegawai dengan posisi atau jabatan kunci yang memiliki peran strategis sebagai penyalaras (*alignment*) tujuan Korporat sekaligus supervisi dan pengendali pencapaian kinerja di Divisi/Kantor Wilayah/Kantor Cabang masing-masing, jabatan tersebut meliputi jabatan struktural L1 dan L2 yaitu jabatan Kepala Divisi, Kepala Kantor Wilayah, Kepala Cabang, Kepala Cabang Syariah, *Deputy* / Wakil Kepala Divisi, *Deputy Regional Manager Business*, *Deputy Regional Manager Support*, *Department Head*, *Deputy Branch Manager* dan *Deputy Service Manager*, *Commercial Banking Center (CBC) Head*, *CBC Manager*, *Commercial Risk Head*, *Commercial Risk Manager*, *Regional Loan Processing Center (RLPC) Head* serta jabatan setara L1 dan L2 yang ditetapkan oleh Direksi.

Dalam proses pembelian saham, Perseroan bekerja sama dengan perusahaan sekuritas untuk proses pembelian dan administrasi saham yang sudah diataskan kepada masing-masing pegawai penerima. Program LTI kepada pegawai akan dilaksanakan secara bertahap selama 3 tahun yaitu tahun 2020, 2021 dan 2022 dengan total anggaran sebesar Rp150 Miliar yang dapat diterima oleh Pegawai melalui pencapaian target kinerja dan persyaratan lainnya yang telah ditetapkan oleh Bank dengan distribusi *vesting* sebagai berikut:

1. LTI tahap 1/*vesting* 1 pada tahun 2020, diberikan maksimum 50% dari total anggaran pembelian saham selama 3 tahun dengan jumlah saham 58.983.900 lembar yang dibeli dengan rata-rata Rp. 958,55/lembar dan didistribusikan kepada 549 pegawai penerima LTI.

2. LTI tahap 2/*vesting* 2 pada tahun 2021, diberikan maksimum 25% dari total anggaran pembelian saham selama 3 tahun dengan jumlah saham 15.936.000 lembar yang dibeli dengan rata-rata Rp. 1.566,62/lembar dan didistribusikan kepada 599 pegawai penerima LTI.
3. LTI tahap 3/*vesting* 3 pada tahun 2022, diberikan maksimum 25% dari total anggaran pembelian saham selama 3 tahun dan dibelikan saham BBTN di tahun 2022.

Whistleblowing System

Kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran atau *Whistleblowing System* (WBS) Perseroan berpedoman pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 39/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang Penerapan Strategi Anti *Fraud* Bagi Bank Umum serta Petunjuk Teknis No. PT.7-B.2 tanggal 31 Oktober 2023 tentang Pengelolaan *Whistleblowing System*. WBS Perseroan merupakan bagian dari sistem pengendalian internal dalam mencegah terjadinya praktik penyimpangan dan bertujuan untuk mendeteksi dini dan mencegah terhadap terjadinya penyimpangan ataupun pelanggaran serta secara bertahap menciptakan iklim kerja yang terbuka, tulus, jujur dan bertanggung jawab di Perseroan.

Penyampaian dan Media Laporan Pelanggaran

Mekanisme penyampaian laporan pelanggaran melalui WBS dilakukan dengan membuat laporan pengaduan/pengungkapan dan mengirimkannya berdasarkan indikasi pelanggaran tersebut dilakukan oleh siapa, meliputi:

1. Apabila pihak terlapor adalah pegawai Bank sampai dengan 2 (dua) level di bawah Direksi dan bukan merupakan Tim WBS, maka Pengelola WBS Independen akan menyampaikan laporan kepada Tim WBS.
2. Apabila pihak terlapor adalah pegawai Bank 1 (satu) level di bawah Direksi dan bukan merupakan Tim WBS, maka Pengelola WBS Independen akan menyampaikan laporan kepada Direktur Utama.
3. Apabila pihak terlapor adalah anggota Tim WBS, maka Pengelola WBS Independen akan menyampaikan laporan kepada Direktur Utama.
4. Apabila pihak terlapor adalah Direksi, maka Pengelola WBS Independen akan menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris dan Pengelola WBS Kementerian BUMN.
5. Apabila pihak terlapor adalah Anggota Dewan Komisaris dan/atau Komite di bawah Dewan Komisaris, maka Pengelola WBS Independen akan menyampaikan laporan kepada Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Komite di bawah Dewan Komisaris yang tidak terkait pengaduan dan Pengelola WBS Kementerian BUMN (khusus terlapor adalah Anggota Dewan Komisaris).
6. Apabila pihak terlapor adalah Komisaris secara bersama-sama atau secara kolegial, maka Pengelola WBS Independen akan menyampaikan laporan kepada Pengelola WBS Kementerian BUMN.

7. Apabila pihak terlapor adalah Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perusahaan Anak maka Pengelola WBS Independen akan menyampaikan laporan kepada Direktur Utama Bank.

Bank juga membangun infrastruktur pendukung dalam menerapkan kebijakan WBS dimana pelapor dapat menyampaikan laporannya melalui media sebagai berikut:

1. PO Box 2828 JKP 10028
2. Website : <https://idn.deloitte-halo.com/btnsiips>
3. Email : btnsiips@tipoffs.info;
4. SMS : +62 813 8870 1117
5. Whatsapp : +62 813 8870 1117
6. Telepon : +62 21-50928882
7. Faximili : +62 21-50928883

Perlindungan bagi Pelapor (*Whistleblower*)

Perseroan memiliki komitmen untuk memberikan perlindungan kepada setiap pelapor yang beritikad baik melaporkan setiap pelanggaran yang berisiko merugikan Perseroan. Perlindungan kepada Pelapor diberikan untuk mendukung keberanian Pelapor dalam melaporkan dugaan pelanggaran dan/atau jika terdapat tindakan balasan dari Terlapor. Terhadap Pelapor (*Whistleblower*) yang menyampaikan laporan WBS yang diakui tingkat akurasi dan beritikad baik, Perseroan dapat memberikan jaminan perlindungan sebagai berikut:

1. Penyediaan Media Pelaporan WBS yang bebas dan rahasia. Pelapor akan mendapatkan informasi status laporan WBS yang disampaikan oleh Pengelola WBS Independen melalui media yang ditetapkan.
2. Jaminan kerahasiaan identitas Pelapor, terkecuali bila jika terdapat tuntutan hukum mengharuskan identitas ini menjadi dibuka di hadapan hakim.
3. Perlindungan dari tindakan balasan dari Terlapor. Perlindungan ini dapat berupa:
 - a. Perlindungan fisik dan/atau psikis baik terhadap diri sendiri maupun keluarganya.
 - b. Perlindungan terhadap harta benda miliknya dan milik keluarganya atas teror ataupun pembalasan yang harus dialaminya.
 - c. Perlindungan administratif yang berupa penundaan kenaikan pangkat, pemecatan, mutasi yang tidak layak, termasuk kepastian kerja, dan lainnya.
 - d. Perlindungan hukum, dalam hal melalui proses litigasi disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

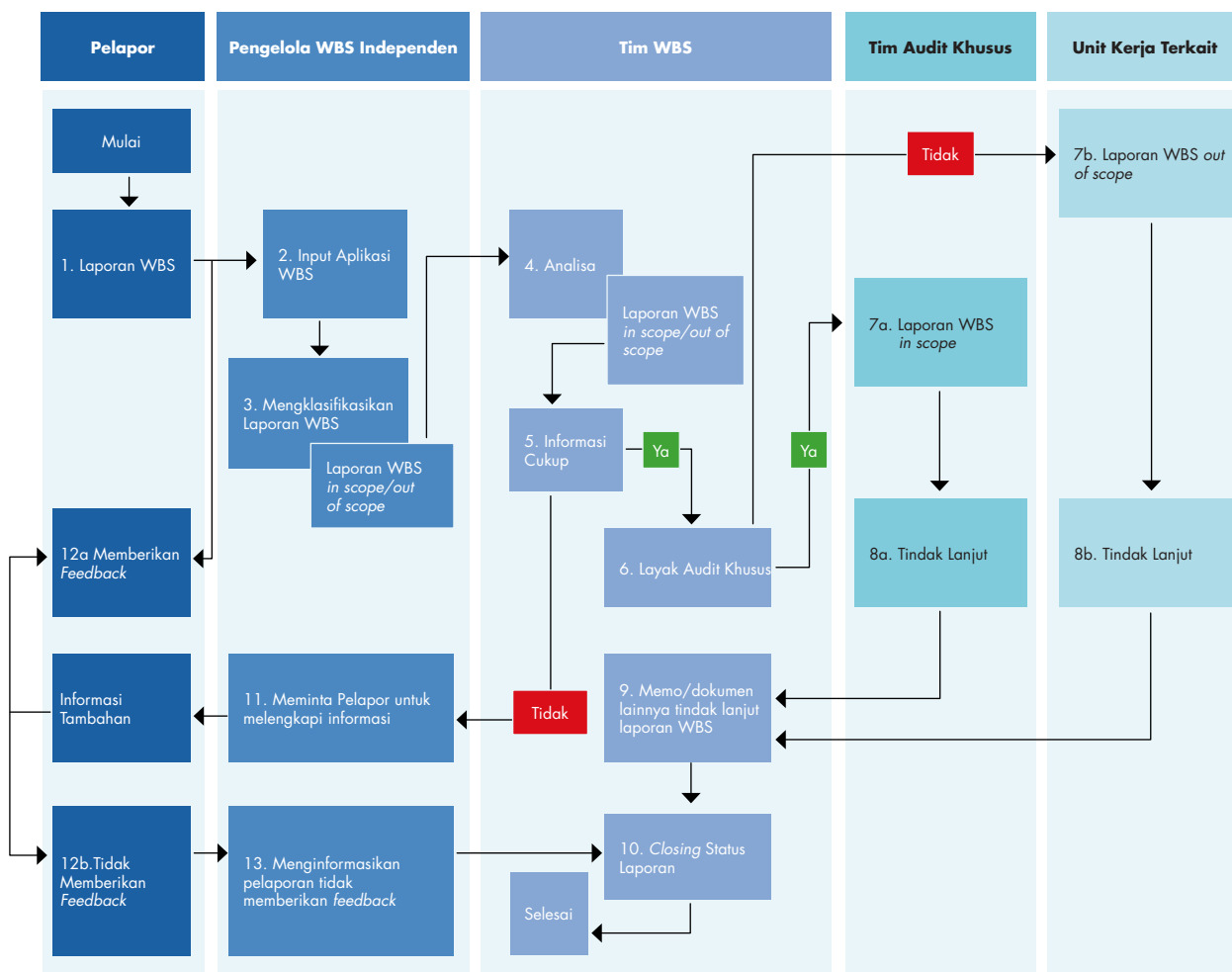
Penanganan Pengaduan

Perseroan telah bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia terkait dengan penanganan WBS dalam upaya pemberantasan korupsi. Kerja sama tersebut bertujuan membangun dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi penanganan pengaduan baik secara internal maupun eksternal yang terintegrasi secara profesional, transparan, akuntabel dengan mengutamakan kerahasiaan dalam rangka optimalisasi pemberantasan tindak pidana korupsi.

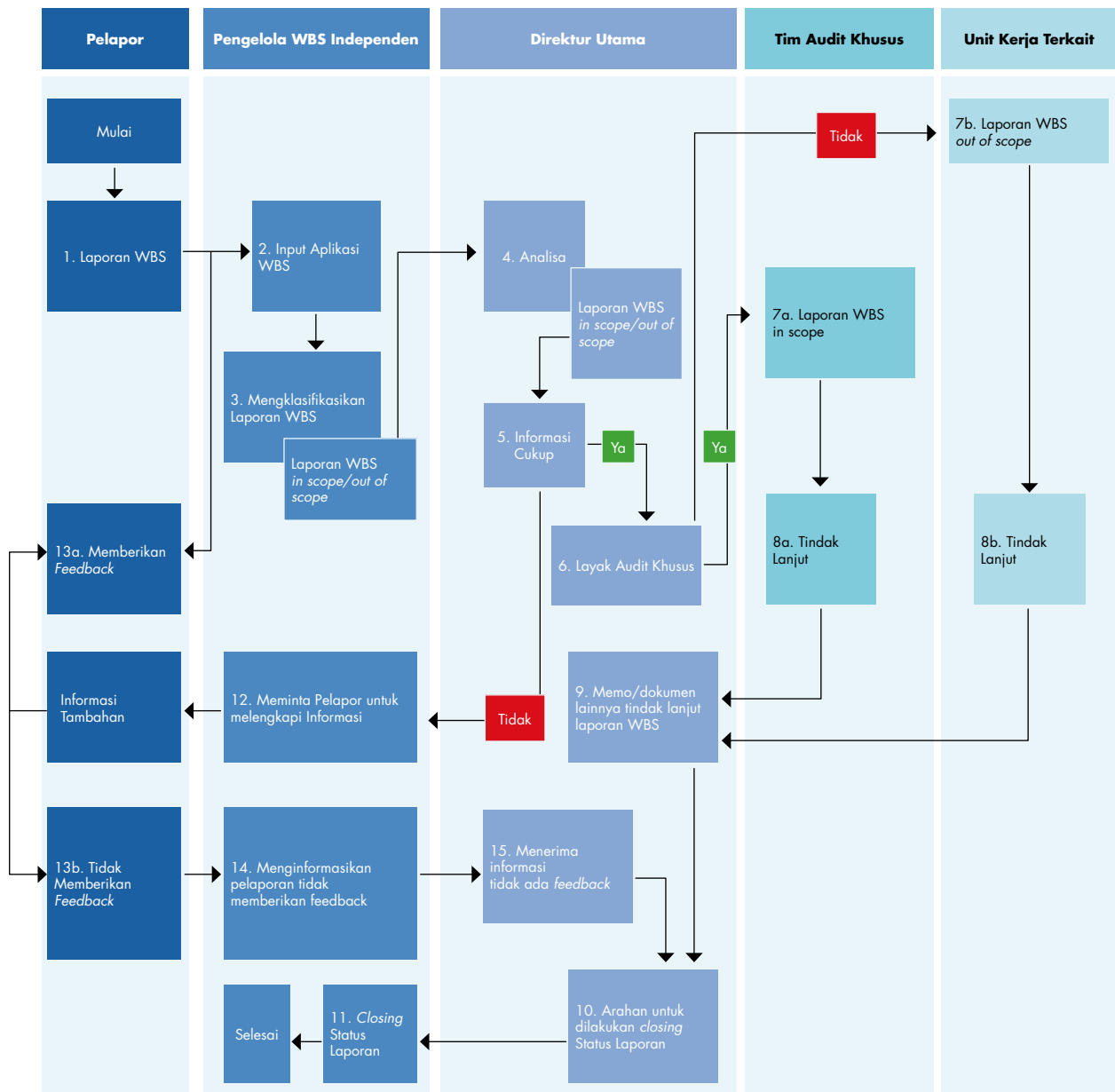


Setiap laporan yang masuk, Tim WBS menindaklanjuti dengan mekanisme sebagai berikut:

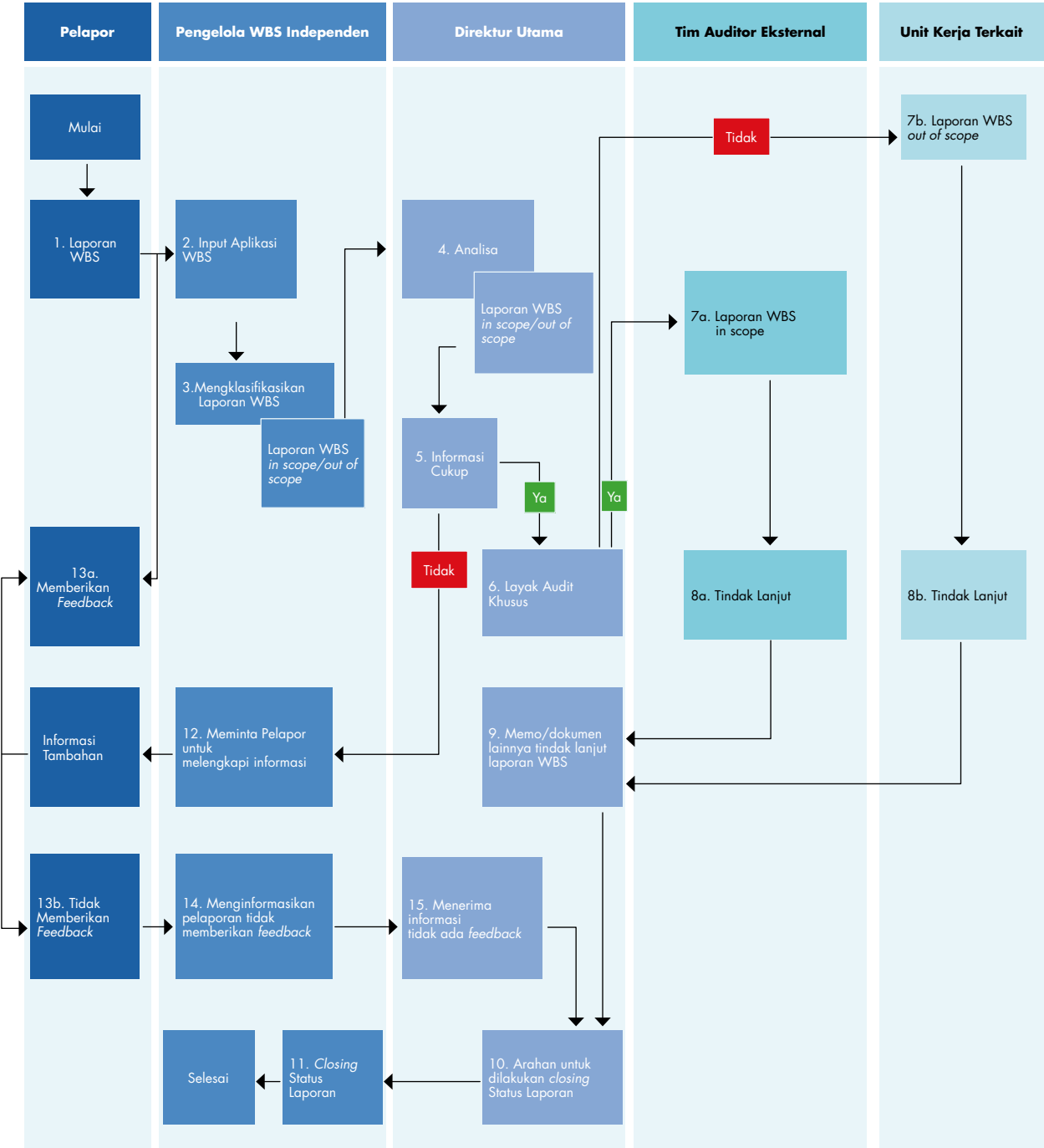
1. Jika Terlapor adalah pegawai Bank (sampai dengan 2 level di bawah Direksi) dan bukan Tim WBS



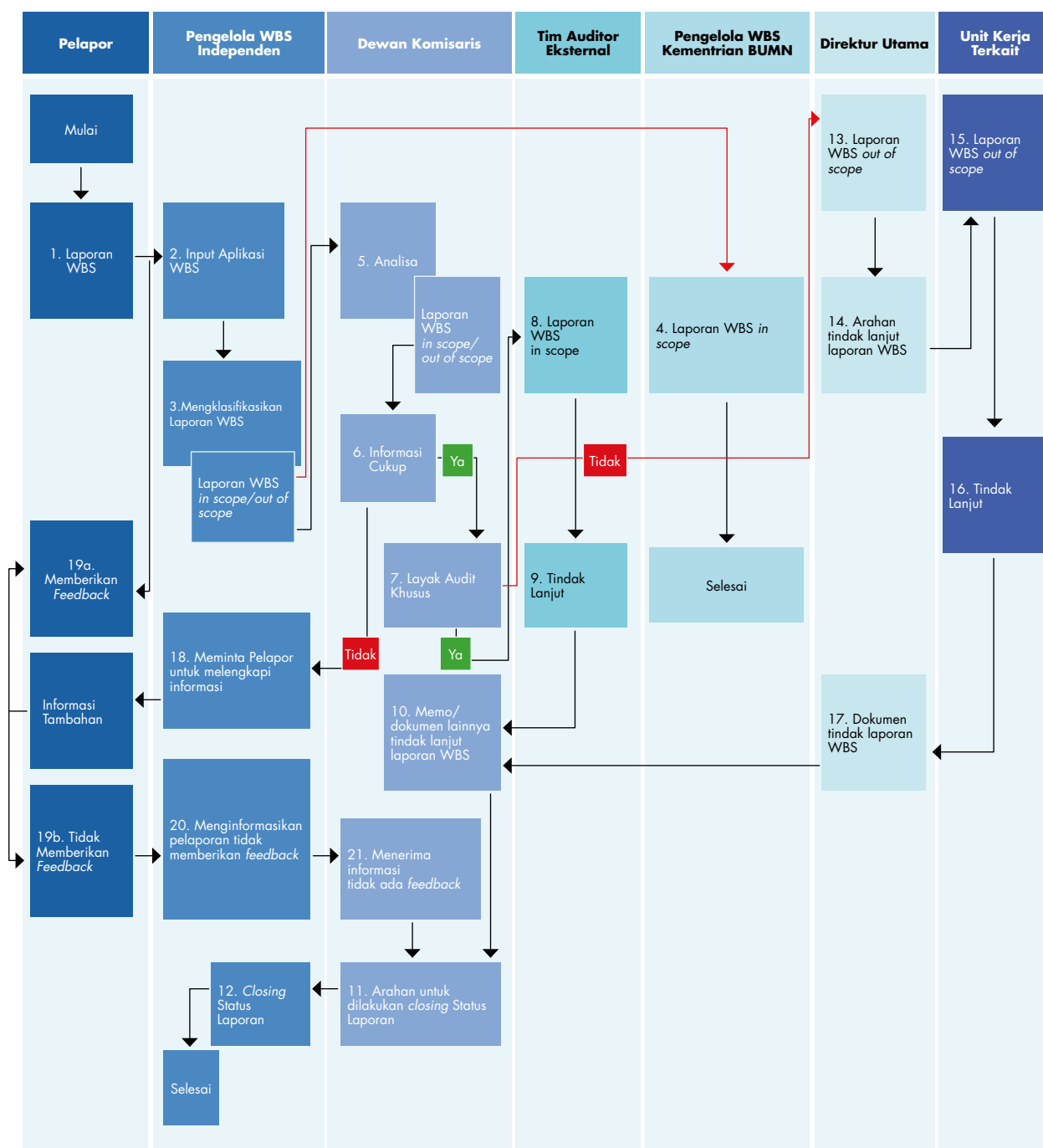
2. Jika Terlapor adalah pegawai Bank (1 level di bawah Direksi) dan bukan Tim WBS



3. Jika Terlapor adalah Tim WBS

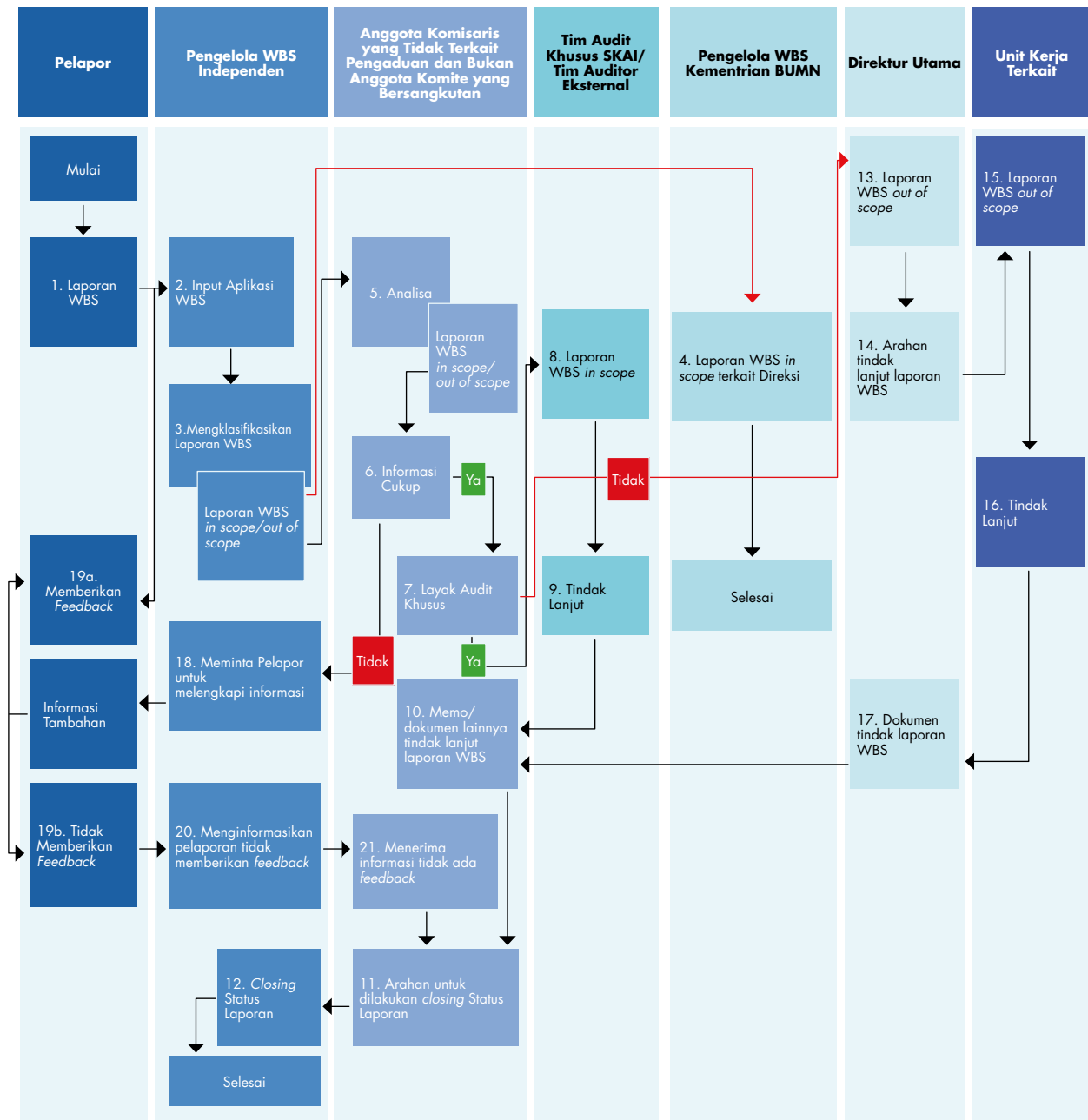


4. Jika Terlapor adalah Direksi

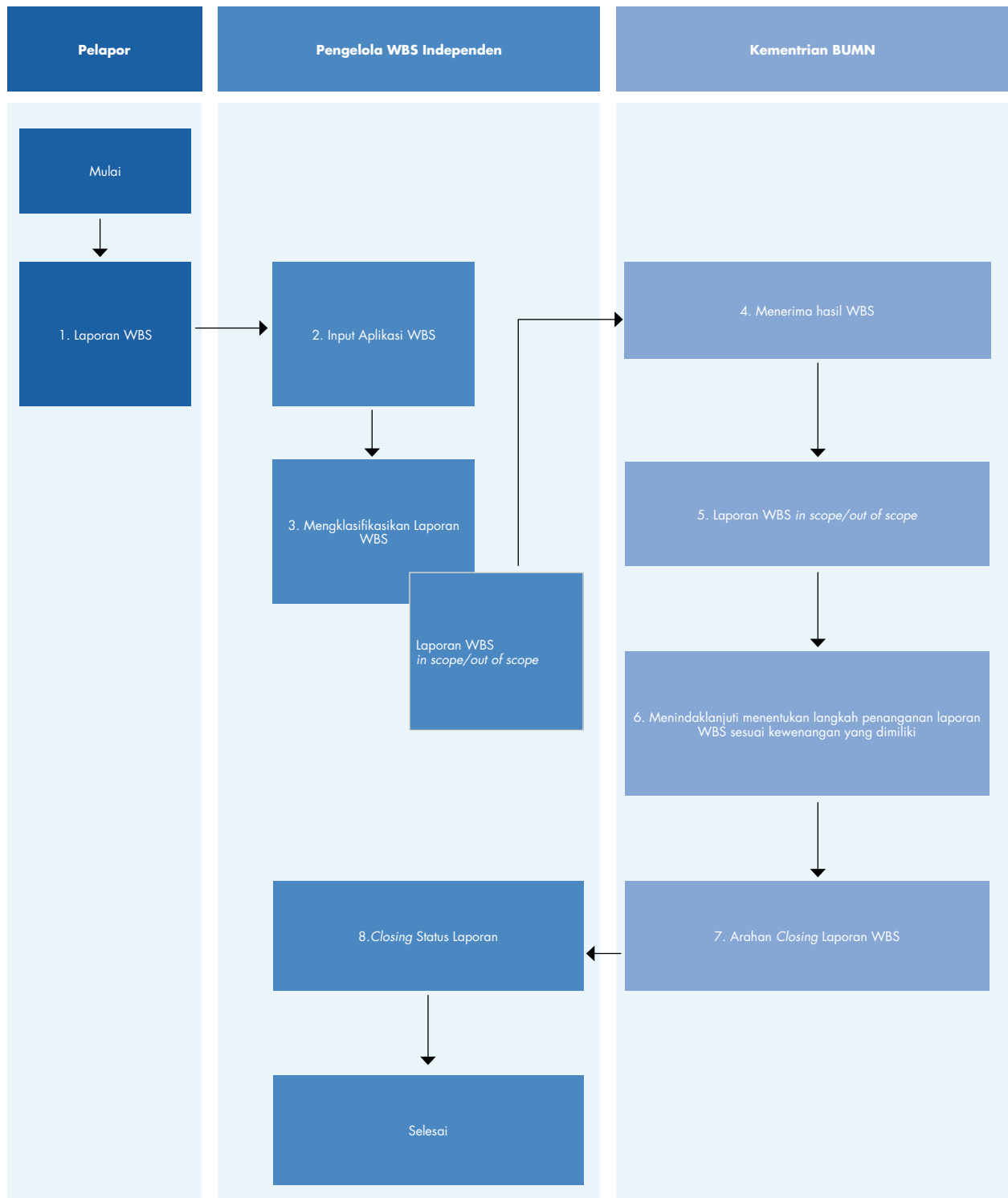




5. Jika Terlapor adalah Komisaris dan/atau Komite di bawah Dewan Komisaris

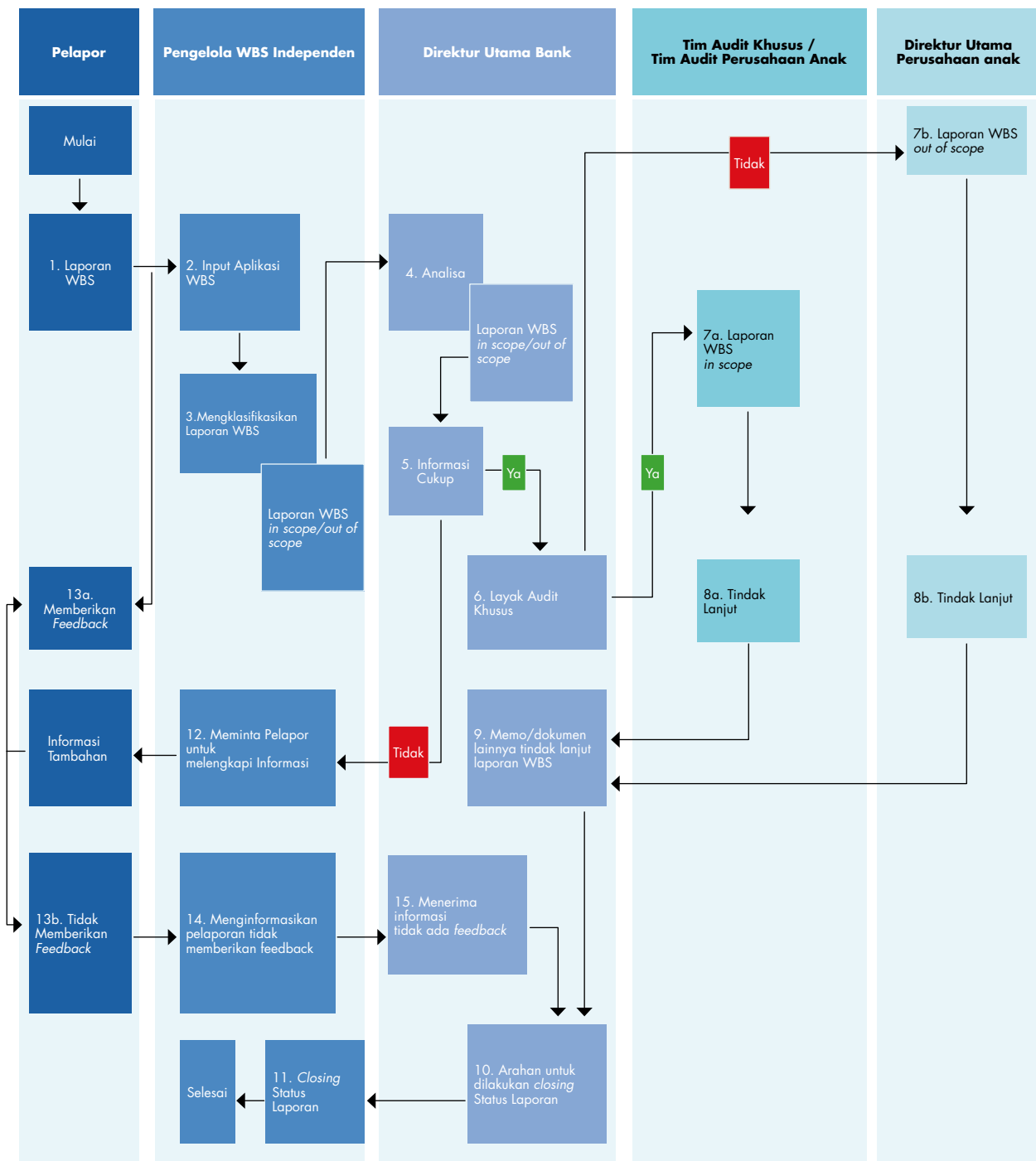


6. Jika Terlapor adalah Komisaris secara bersama-sama





7. Jika Terlapor adalah Direksi dan/atau Komisaris Perusahaan Anak



Jenis Pelanggaran yang Dapat Dilaporkan

Pelanggaran yang dimaksud adalah perbuatan yang melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak bermoral atau perbuatan lain yang dapat merugikan organisasi maupun pemangku kepentingan. Adapun beberapa contoh pelanggaran yang dapat dilaporkan berdasarkan kebijakan WBS ini, antara lain:

1. Perilaku - Gaya Hidup;
2. *Fraud*;
3. Benturan Kepentingan;
4. Penyalahgunaan Wewenang;
5. Penyuapan/Penyogokan;
6. Gratifikasi;
7. Pemerasan;
8. Pelanggaran Hukum Lain-Lain.

Pengelola Laporan Pelanggaran

Struktur Pengelola WBS terdiri dari Penanggung Jawab Pelaksanaan dan Tim WBS. Penanggung jawab pelaksanaan adalah Direktur Utama sedangkan Tim WBS terdiri dari:

1. Kepala Satuan Kerja Audit Intern;
2. Wakil Kepala Satuan Kerja Audit Intern;

3. Unit Pengelola WBS yang dikepalai seorang Kepala Departemen di Satuan Kerja Audit Intern.

Unit Pengelola WBS adalah unit di bawah Satuan Kerja Audit Intern yang bertugas menangani semua proses pelaksanaan tugas WBS pada organisasi Perseroan. Selain itu, dalam pengelolaan pengaduan yang diterima pada saluran WBS, Perseroan dibantu oleh pihak ketiga yang independen yaitu PT Deloitte Advis Indonesia yang memberikan kesempatan untuk melaporkan dugaan pelanggaran, baik secara *anonym* maupun tidak *anonym*.

Sosialisasi Whistleblowing System

Perseroan melakukan internalisasi WBS dengan pendistribusian pedoman Penerapan Kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) yang ditetapkan berdasarkan Surat Edaran Direksi serta presentasi *sharing session* secara langsung kepada seluruh pimpinan dan pegawai Perseroan. Selain itu, guna menjangkau seluruh *stakeholders* Perseroan, sosialisasi *Whistleblowing System* juga dilakukan melalui *website* Perseroan dan berbagai media, seperti buletin internal, poster, *standing banner*, *customer gathering*, presentasi langsung pedoman etika dan kebijakan WBS.

Jumlah Pengaduan dan Proses Pengaduan

Pengaduan yang masuk selama tahun 2023 berjumlah 106 pengaduan yang terdiri dari 30 pengaduan melalui SMS/Telepon/Whatsapp, dan 76 pengaduan melalui Email/*Website*. Berdasarkan jumlah pengaduan yang masuk, 79 pengaduan tidak terbukti, 6 pengaduan masih dalam proses pengumpulan informasi/tindak lanjut, dan sisanya 21 pengaduan telah selesai diproses dan/atau telah diberikan sanksi. Secara rinci, jumlah pengaduan yang diteruskan ke proses audit dalam beberapa tahun terakhir sebagai berikut:

Tabel Pengaduan WBS yang Diteruskan ke Proses Audit

Tahun	Metode Penyampaian			Tindak Lanjut			
	Surat/ PO BOX	SMS/ Telepon/ WA	Email/ Website	Laporan ditutup(tidak terbukti)	Laporan masih dalam proses (Proses Audit/ Proses Pelaporan/ Proses Lintas Divisi)	Laporan telah selesai diproses dan atau telah diberikan sanksi (termasuk sanksi administratif)	Laporan diteruskan kepada Penyidik (terkait tindak pidana umum atau Korupsi)
2019	5	2	3	0	1	9	0
2020	3	2	9	0	4	10	0
2021	0	2	3	0	0	5	0
2022	0	1	1	0	2	0	0
2023	0	1	4	0	0	5	0



Program Anti Korupsi

Perseroan terus berkomitmen terhadap pemberantasan korupsi dengan terus mendorong efektivitas penerapan kebijakan pengendalian gratifikasi, *Whistleblowing System*, Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), serta Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT). Selain itu, Perseroan juga melakukan upaya dalam mendukung Program Anti Korupsi melalui pelaksanaan Sertifikasi dan *Surveillance* ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), keikutsertaan Sertifikasi Ahli Pembangun Integritas (API) serta sertifikasi Penyuluh Anti Korupsi (PAKSI).

Program dan Prosedur yang Dilakukan Dalam Mengatasi Praktik Korupsi

Sistem Manajemen Anti Penyuapan

Sejalan dengan komitmen pemberantasan korupsi, pada tanggal 11 Agustus 2020 Bank BTN telah memiliki sertifikasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi SNI ISO 37001:2016 atas implementasi ISO 37001:2016 di lingkungan Perseroan. Adapun ruang lingkup sertifikasi ISO 37001:2016 sampai dengan Tahun 2023 yaitu:

1. Pengadaan barang dan/atau jasa pada *Procurement and Fixed Asset Management Division* (PFAD).
2. Perkreditan Komersial pada *Commercial Banking Division* (CMBD) dan *Corporate Banking Division* (CBD).
3. SME Restrukturisasi Kredit pada seluruh Kantor Wilayah.
4. *Wholesale Credit Risk Division* (WRD).
5. *Small Medium Enterprise Banking Division* (SMBD).
6. *Commercial Banking Center Jakarta Raya, Bintaro Jaya, Bekasi dan Bandung*.

Dalam upaya mempertahankan sertifikat ISO 37001:2016 tersebut, Pada tanggal 24 s.d. 28 Juli Tahun 2023 telah dilakukan audit resertifikasi ISO 37001:2016 SMAP pada lingkup *Procurement and Fixed Asset Management Division* (PFAD), *Commercial Banking Division* (CMBD) dan *Corporate Banking Division* (CBD) serta audit *surveillance* ISO 37001:2016 SMAP pada lingkup *Commercial Banking Center Jakarta Raya, Bintaro Jaya, Bekasi dan Bandung* SME Restrukturisasi Kredit pada seluruh Kantor Wilayah oleh Badan Sertifikasi. Perseroan berhasil mempertahankan sertifikasi SMAP dengan mendapatkan sertifikat atas audit resertifikasi dan *surveillance* oleh Badan Sertifikasi ISO 37001:2016 SMAP. Selain itu, dalam rangka perluasan ruang lingkup ISO 37001:2016 SMAP, pada tanggal 14 s.d. 20 Desember Tahun 2023 telah dilaksanakan audit oleh Badan Sertifikasi pada ruang lingkup *Small Medium Enterprise Banking Division* (SMBD) dan 4 *Commercial Banking Center* (Jakarta Raya, Bintaro, Bekasi dan Bandung) dengan hasil seluruh ruang lingkup berhasil mendapatkan sertifikat ISO 37001:2016 SMAP.

Untuk menerapkan efektivitas penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), Perseroan memiliki organisasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) sesuai Panduan SNI ISO 37001:2016 yang terdiri dari *Governing Body*, *Top Management* dan Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP). Dalam hal ini *Governing Body* menjadi kewenangan Dewan Komisaris sedangkan FKAP fungsinya berada pada Compliance and Governance Division.

Adapun pengelolaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) telah berjalan dengan baik sesuai Pedoman Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) diantaranya yaitu:

1. Penandatanganan Kebijakan Anti Penyuapan Bank BTN pada Tahun 2023 oleh *Top Management* (dhi. Direktur Utama) dan *Governing Body* (dhi. Komisaris Utama) dalam rangka pelaksanaan komitmen Manajemen Perseroan terhadap anti penyuapan;
2. Melakukan pengkajian perubahan dalam isu internal dan eksternal yang relevan dengan sistem manajemen anti penyuapan;
3. Melakukan pengkajian Efektivitas tindakan yang diambil untuk menunjukkan risiko Penyuapan;
4. Melakukan pengkajian Peluang peningkatan berkelanjutan dari SMAP;
5. Melakukan internalisasi SMAP dan *Whistleblowing System* (WBS) melalui berbagai media sosialisasi kepada Debitur dan Vendor guna peningkatan kualitas SMAP;
6. Penandatanganan Pakta Integritas Pegawai terkait komitmen implementasi SMAP yang diperbaharui setiap tahunnya secara berkala;
7. Melakukan pengkajian terhadap penambahan unit kerja yang disertifikasi ISO 37001:2016 SMAP.

Perseroan berkomitmen untuk melakukan *continuous improvement* dalam menerapkan ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan guna mewujudkan Perseroan bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Perseroan akan senantiasa mengajak rekan bisnis/mitra kerja untuk mendukung pelaksanaan SMAP ISO 37001:2016 di Perseroan melalui penandatanganan Pakta Integritas dengan komitmen bahwa selama bekerja sama dengan Perseroan tidak melakukan praktik gratifikasi, suap maupun tindakan lain yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan diharapkan dapat menambah kepercayaan seluruh *stakeholders* Perseroan, termasuk rekan bisnis/mitra kerja dalam menjalin kerjasama dan dapat meningkatkan efisiensi proses bisnis. Perseroan sebagai lembaga keuangan sangat perlu meningkatkan reputasi dengan proses bisnis yang efisien, GCG dan mengikuti standar internasional seperti ISO 37001:2016.

Hasil akhir yang akan diperoleh Perseroan dengan penerapan ISO 37001:2016 adalah peningkatan daya saing Perseroan dalam jangka panjang sehingga Perseroan akan semakin sehat dan tumbuh secara *sustainable*. Perseroan selama ini juga telah menerapkan SNI ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu, yaitu proses audit pada Internal Audit Division, proses KPR pada Non Subsidized Mortgage & Personal Lending Division, proses bisnis pada Enterprise Risk Management Division, Compliance & Governance Division dan Learning Management Division.

PELAKSANAAN KEIKUTSERTAAN SERTIFIKASI AHLI PEMBANGUN INTEGRITAS (API)

Keikutsertaan Sertifikasi Ahli Pembangun Integritas (API) dilakukan dengan tujuan untuk memperkuat sistem integritas Perseroan khususnya dalam pencegahan korupsi dan sebagai komitmen atas kerja sama Perseroan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam program Profesional Integritas (PROFIT).

Sertifikasi Ahli Pembangun Integritas (API) adalah personil bersertifikat yang berkompeten membangun sistem integritas yang berstandar nasional dalam upaya pemberantasan dan pencegahan korupsi. Perseroan berupaya membangun sistem integritas dan memperkuat sistem integritas secara berkelanjutan salah satunya melalui sertifikasi API.

Pegawai Perseroan yang telah dinyatakan kompeten dan menerima sertifikat API sejak tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 sebanyak 85 pegawai. Para peserta sertifikasi API yang telah kompeten kedepannya diharapkan dapat menjadi *trigger mechanism* dan dapat menerapkan komitmen yang telah dibuat dalam bentuk rencana tindak lanjut setelah sertifikasi yaitu meningkatkan *awareness* terkait integritas, membuat profil risiko dan mitigasinya mengenai aktivitas bidang pekerjaan area rawan korupsi, mendorong pembentukan dan penguatan kebijakan pencegahan korupsi di lingkungan kerja atau instansi dengan melakukan internalisasi melalui kegiatan webinar dan sosialisasi mengenai GCG dan Ketentuan Kedisiplinan kepada seluruh pegawai di lingkungan kerja secara berkala dan berkesinambungan.

Keikutsertaan Perseroan dalam pelaksanaan sertifikasi Ahli Pembangun Integritas (API) yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) KPK tahun 2023 diikuti 2 skema yaitu API Utama dan API Muda yang terdiri dari 2 Batch yaitu Batch 1 (14-15 Februari 2023) dan Batch 2 (25-27 Juli 2023) dimulai dari proses *e-learning* sampai dengan pelaksanaan asesmen terdapat 8 pegawai dalam pelaksanaan sertifikasi API Utama dan 18 pegawai dalam pelaksanaan sertifikasi API Muda yang dinyatakan kompeten.

Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan dalam mengikuti sertifikasi Ahli Pembangun Integritas (API) sepanjang periode 2023 sebagai berikut:

1. Pengajuan Ijin Prinsip keikutsertaan dan usulan calon peserta sertifikasi Ahli Pembangun Integritas kepada Direksi dari Compliance and Governance Division (CMGD);

2. Verifikasi internal para peserta dari Human Capital Management Division (HCMD);
3. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis dari LSP KPK dan Compliance and Governance Division (CMGD);
4. Pendalaman materi melalui *e-learning* dari LSP KPK;
5. Pengisian form APL-01 (formulir biodata calon peserta uji kompetensi);
6. Pengisian form APL-02 (formulir asesmen mandiri peserta uji kompetensi);
7. Pendaftaran peserta melalui link LSP KPK;
8. Pelaksanaan Asesmen secara *offline*.

Pada Acara Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2023 yang dilaksanakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tanggal 12 Desember 2023 di Istora Senayan Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan penghargaan kepada salah satu pegawai tersertifikasi API Bank BTN sebagai Ahli Pembangun Integritas Inspiratif Kategori API Teraktif 2023. Penghargaan diberikan langsung oleh Wakil Ketua KPK Bapak Nurul Ghufon.

PELAKSANAAN KEIKUTSERTAAN SERTIFIKASI PENYULUH ANTIKORUPSI (PAKSI)

Perseroan dalam mendukung program dan upaya pencegahan korupsi dari KPK mengikuti Penyuluh Antikorupsi (PAKSI) yang melibatkan pegawai perseroan dan IIKPA sampai dengan Tahun 2023 telah tersertifikasi PAKSI sebanyak 36 orang. Penyuluh Anti Korupsi (PAKSI) adalah personil yang bersertifikat okupasi Penyuluh Antikorupsi dan mempunyai lingkup penyuluhan anti korupsi bidang tertentu serta diberi tugas oleh organisasinya untuk melakukan kegiatan penyuluhan anti korupsi pada lingkup organisasinya dan jejaring organisasinya.

Keikutsertaan Perseroan dalam pelaksanaan sertifikasi Penyuluh Antikorupsi (PAKSI) yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) KPK tahun 2023 dimulai dari proses *e-learning*, Diklat Pelatihan Calon Penyuluh Antikorupsi (PELOPOR) sampai dengan pelaksanaan asesmen pada tanggal 11 s.d. 12 April 2023 terdapat 8 pegawai dan 1 orang dari Ikatan Istri Karyawan dan Pensiunan (IIKPA) yang dinyatakan kompeten.

Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan dalam mengikuti sertifikasi Penyuluh Antikorupsi (PAKSI) sebagai berikut:

1. Pengajuan Ijin Prinsip keikutsertaan dan usulan calon peserta sertifikasi Penyuluh Antikorupsi kepada Direksi dari Compliance and Governance Division (CMGD);
2. Verifikasi internal para peserta dari Human Capital Management Division (HCMD);
3. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis dari LSP KPK dan Compliance and Governance Division (CMGD);
4. Pelaksanaan *E-Learning* "Pengetahuan Dasar Antikorupsi dan Integritas" yang dilaksanakan secara mandiri (*online*);
5. Pengisian Formulir Pendaftaran Pelatihan Calon Penyuluh Anti Korupsi (PELOPOR);

6. Pelaksanaan Diklat PELOPOR secara *offline*;
7. Pendaftaran Sertifikasi Asesmen Penyuluh Anti Korupsi (PAKSI) melalui link LSP KPK;
8. Pelaksanaan Asesmen Penyuluh Antikorupsi (PAKSI) secara *online*.

ACARA PERINGATAN HARI ANTIKORUPSI SEDUNIA 2023

Memperingati Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) pada 21 Desember 2023, Perseroan melakukan serangkaian kegiatan diantaranya diseminasi pesan antikorupsi melalui berbagai media seperti media sosial Perseroan (*instagram, facebook, twitter*), video di TV LED Perseroan, *whatsapp* dan *email blast* kepada seluruh pegawai Perseroan, umbul-umbul tema hakordia di Lobby Menara Bank BTN.

Acara Puncak Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2023 di lingkungan Internal Bank BTN dilaksanakan di Menara Bank BTN pada tanggal 21 Desember 2023 dengan berbagai kegiatan mulai dari penguatan integritas dari Narasumber Bapak Wawan Wardiana selaku Deputy Pendidikan dan Peran serta Masyarakat KPK RI mengenai pencegahan korupsi sektor dunia usaha, *launching web* pelaporan gratifikasi, pemberian penghargaan bagi pegawai pelapor gratifikasi, simbolis pemakaian rompi API angkatan 2023, pengumuman pemenang lomba poster gratifikasi serta pameran poster anti gratifikasi karya pegawai.

Penghargaan terhadap pelapor gratifikasi diberikan oleh Direktur Human Capital, Compliance and Legal Perseroan kepada 3 pegawai terpilih yang melaporkan gratifikasi pada tahun 2023 pada masing-masing kategori yaitu Kategori pelapor gratifikasi dengan jumlah laporan terbanyak dan Kategori pelaporan gratifikasi dengan jumlah nominal terbanyak, serta 1 pegawai terpilih dengan kategori pelapor inspiratif.

Pada Acara Hakordia tersebut, apresiasi juga diberikan kepada 3 pegawai pemenang lomba design poster anti gratifikasi Tahun 2023 oleh *Compliance and Governance Division Head*, serta dilakukan pemberian simbolis Rompi API kepada 2 (dua) pegawai perwakilan Ahli Pembangun Integritas (API) Utama dan Muda angkatan Tahun 2023 oleh Deputy Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK. Diharapkan dengan adanya apresiasi tersebut maka akan meningkatkan motivasi pegawai dalam melaksanakan pengendalian gratifikasi dan pencegahan korupsi melalui pelaporan gratifikasi maupun sertifikasi API serta inspirasi bagi seluruh pegawai untuk menjadi *role model* di masing-masing unit kerjanya dan memperkuat sistem integritas di Perseroan dalam upaya pencegahan korupsi.

Pengendalian Gratifikasi

Pengendalian gratifikasi merupakan aspek penting bagi Perseroan dalam menjaga proses kegiatan usaha berjalan sesuai dengan etika bisnis yang menjunjung tinggi nilai integritas. Perseroan melakukan pengendalian gratifikasi bertujuan untuk membangun nilai-nilai GCG dan menanamkan nilai integritas kepada seluruh pegawai sehingga, proses bisnis senantiasa didasarkan pada etika dan tanggung jawab. Pengendalian gratifikasi juga dibutuhkan agar kepentingan bisnis tetap berjalan dengan baik dan beretika namun tidak bertentangan dengan ketentuan larangan gratifikasi.

Sejalan dengan maksud tersebut, Perseroan menerapkan budaya untuk tidak menerima pemberian atau imbalan dari nasabah, debitur, vendor, rekanan, mitra kerja dan pihak ketiga lainnya atas jasa yang diberikan oleh Pegawai Perseroan dalam menjalankan tugasnya. Hal ini dilakukan antara lain pada saat menjelang hari raya keagamaan (Idul Fitri, Natal/Tahun Baru). Perseroan selalu membuat pengumuman melalui surat kabar nasional yang menjangkau masyarakat secara luas bahwa Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh jajaran Pegawai Perseroan mempunyai komitmen penuh untuk tidak menerima dan/atau meminta hadiah atau bingkisan dalam bentuk apapun dari/kepada nasabah, debitur, rekanan/vendor/mitra kerja dan pihak ketiga lainnya.

Perseroan juga mengajak kepada seluruh nasabah, debitur, rekanan/vendor/mitra kerja dan pihak lainnya yang telah memiliki maupun yang bermaksud melakukan hubungan bisnis dengan Perseroan mendukung komitmen tersebut dengan tidak memberikan hadiah atau bingkisan dalam bentuk apapun baik secara langsung maupun tidak langsung. Pemberitahuan mengenai hal tersebut juga dilakukan Perseroan melalui surat tertulis kepada setiap nasabah, debitur, vendor, rekanan, mitra kerja dan pihak ketiga lainnya yang melakukan hubungan bisnis dengan Perseroan.

KEBIJAKAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Bukti keseriusan Perseroan dalam mendukung pemberantasan korupsi adalah bekerjasama dengan KPK melakukan penandatanganan komitmen dalam menerapkan Program Pengendalian Gratifikasi di lingkungan kerja Perseroan sejak tanggal 25 Juni 2014. Berdasarkan komitmen tersebut, pada tahun 2015 Perseroan telah mempunyai pedoman intern serta Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) yang berperan aktif dalam menyebarluaskan kesadaran dan pemahaman tentang Pengendalian Gratifikasi dan Anti Korupsi.

Perseroan menetapkan kebijakan yang menjadi pedoman dalam implementasi pengendalian gratifikasi Perseroan melalui Kebijakan Khusus Nomor KK.6-A tanggal 25 April 2022 perihal Prosedur Pengendalian Gratifikasi dan Petunjuk Teknis Nomor PT.6-A.1 tanggal 25 April 2022 perihal Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi. sebagai inisiatif dalam mendukung Pengendalian Gratifikasi. Surat edaran tersebut mengatur beberapa hal sebagai berikut:

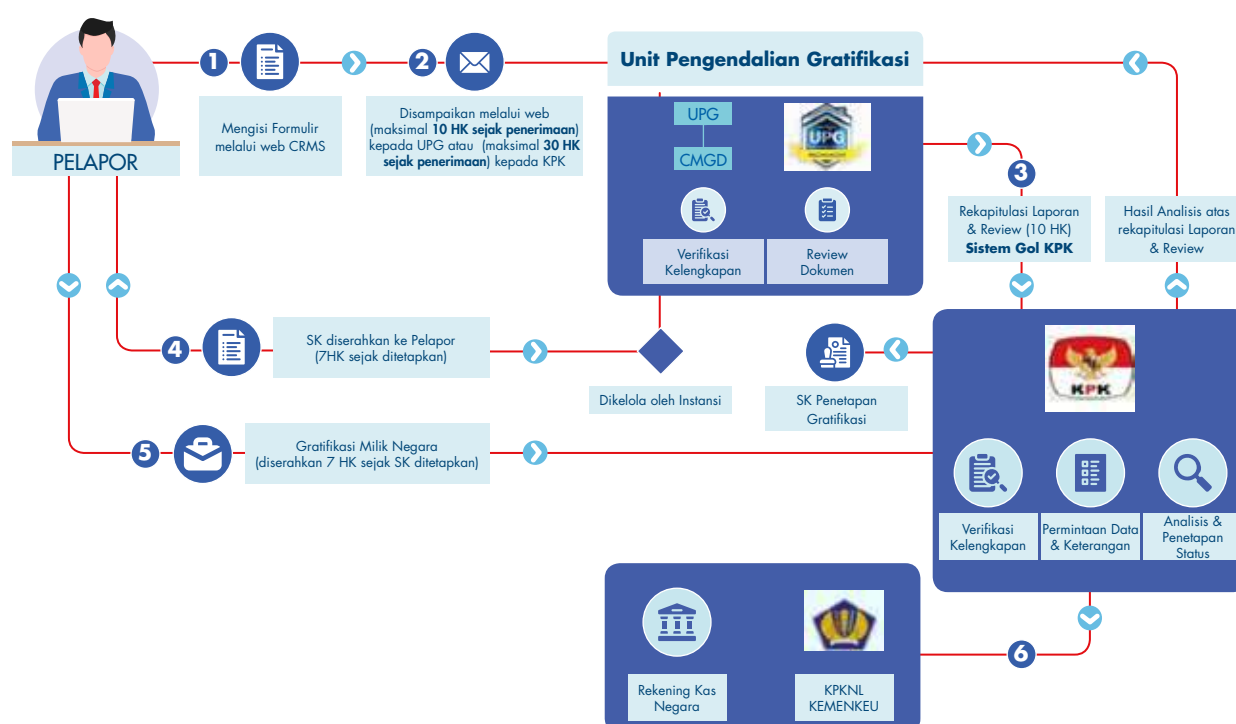
1. Ketentuan Umum Gratifikasi.
2. Prinsip Dasar Pengendalian Gratifikasi.
3. Kategori Gratifikasi.
4. Pengelola Pengendalian Gratifikasi.
5. Mekanisme Pelaporan Gratifikasi.
6. Implementasi Pengendalian Gratifikasi.

Sejak tahun 2019, Perseroan melakukan kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam gerakan Profesional Berintegritas (PROFIT) melalui beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Keikutsertaan *training* sebagai Ahli Pembangun Integritas (API) untuk mengawal upaya pencegahan korupsi;
2. Keikutsertaan program kolaborasi kampanye dengan KPK tentang Anti Korupsi melalui berbagai saluran media komunikasi;
3. *Self Assessment* atas Daftar Periksa Panduan Pencegahan Korupsi Yang Memadai Bagi Korporasi (CEK).

MEKANISME PELAPORAN GRATIFIKASI

Perseroan telah menetapkan mekanisme pelaporan gratifikasi sebagaimana diatur dalam Kebijakan Khusus Nomor KK.6-A tanggal 25 April 2022 perihal Prosedur Pengendalian Gratifikasi dan Petunjuk Teknis Nomor PT.6-A.1 tanggal 25 April 2022 perihal Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi, dengan alur sebagai berikut:



Keterangan Gambar Mekanisme Pelaporan Gratifikasi:

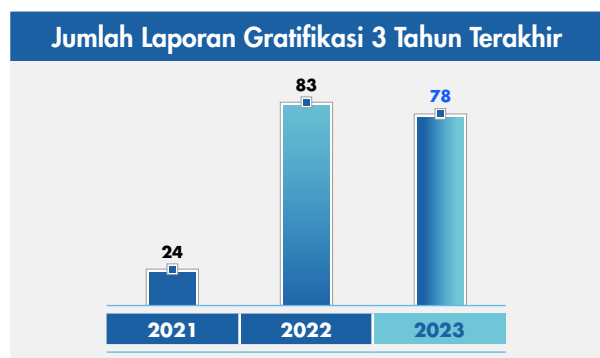
1. Pegawai melaporkan penerimaan gratifikasi kepada KPK melalui UPG (dhi. CMGD) dengan mengisi formulir secara lengkap paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima, Gratifikasi yang diterima oleh Pelapor agar disimpan oleh Pelapor sampai dengan adanya Surat Keputusan KPK atas status kepemilikan gratifikasi dimaksud.
2. Penyampaian formulir disampaikan melalui email UPG dengan alamat: <http://crms.btn.co.id>. Formulir yang digunakan pada Surat Edaran ini disesuaikan dengan jenis gratifikasi yang diterima, dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a. Menggunakan formulir 1, jika gratifikasi berupa uang dan termasuk gratifikasi suap;
 - b. Menggunakan formulir 2, jika gratifikasi diperoleh dari kegiatan kedinasan;
 - c. Menggunakan formulir 3, jika gratifikasi berupa makanan/minuman/parcel dalam rangka penyambutan hari raya. Namun jika gratifikasi yang diperoleh dalam rangka hari raya berupa uang/voucher/barang maka tetap menggunakan formulir 1. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam kelengkapan data pada formulir yaitu pencantuman unit kerja, jabatan, uraian kronologi/ peristiwa pemberian gratifikasi dimaksud serta kontak No. telepon dan alamat email mengingat adanya proses klarifikasi laporan oleh UPG maupun KPK.
3. UPG meneruskan laporan gratifikasi kepada KPK dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak laporan gratifikasi diterima oleh UPG. Selanjutnya KPK melakukan penanganan laporan gratifikasi yang meliputi:
 - a. Verifikasi atas kelengkapan laporan gratifikasi;
 - b. Permintaan data dan keterangan kepada pihak terkait;
 - c. Analisis atas penerimaan gratifikasi; dan
 - d. Penetapan status kepemilikan gratifikasi. Proses yang dilakukan KPK untuk menetapkan status penerimaan laporan gratifikasi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak laporan gratifikasi diterima oleh KPK secara lengkap.
4. KPK menyampaikan Surat Keputusan atas status penerimaan gratifikasi kepada penerima/pelapor gratifikasi serta tembusan kepada UPG paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal SK ditetapkan. Dalam hal status kepemilikan gratifikasi ditetapkan untuk dikelola oleh instansi maka gratifikasi tersebut diserahkan kepada UPG untuk dikelola Perseroan.
5. Dalam hal KPK menetapkan gratifikasi menjadi milik negara, Pelapor/Penerima menyerahkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal SK ditetapkan. Bukti penyerahan kepada KPK tersebut disampaikan kepada UPG.
6. Dalam hal gratifikasi berupa uang, maka selanjutnya KPK menyetorkan uang yang telah diserahkan oleh

pelapor kepada rekening Kas Negara dan menyerahkan bukti penyetorannya kepada Pelapor. Sedangkan jika gratifikasi yang diserahkan berupa barang maka KPK akan menyerahkan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan menyampaikan bukti penyerahannya kepada Pelapor.

7. Dalam hal gratifikasi berupa uang, maka selanjutnya KPK menyetorkan uang yang telah diserahkan oleh pelapor kepada rekening Kas Negara dan menyerahkan bukti penyetorannya kepada Pelapor. Sedangkan jika gratifikasi yang diserahkan berupa barang maka KPK akan menyerahkan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan menyampaikan bukti penyerahannya kepada Pelapor.

LAPORAN PENERIMAAN GRATIFIKASI

Selama periode tahun 2023, total laporan gratifikasi yang masuk dari kantor pusat maupun kantor cabang sebanyak 78 laporan, yang terdiri dari laporan gratifikasi suap, kedinasan, gratifikasi berupa makanan menjelang hari raya keagamaan maupun Penolakan Gratifikasi.



Pada Tahun 2023 salah satu pegawai Bank BTN diberikan penghargaan oleh KPK pada penyelenggaraan Acara Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) yang diselenggarakan KPK di Istora Senayan Jakarta tanggal 12 Desember 2023. Penghargaan diberikan langsung oleh Pimpinan KPK.

Pelatihan/Sosialisasi Anti Korupsi Kepada Karyawan

Sepanjang tahun 2023, Perseroan telah melakukan kegiatan dalam mendorong efektivitas implementasi kebijakan pengendalian gratifikasi, antara lain:

1. Melakukan diseminasi melalui berbagai media tentang pesan anti gratifikasi kepada seluruh pegawai maupun *stakeholder* Perseroan melalui beberapa kegiatan sebagai berikut:
 - a. Sosialisasi mengenai peran istri dalam pengendalian gratifikasi pada Raker IIKPA di Bulan Januari 2023.
 - b. Pelaksanaan internalisasi kepada seluruh pegawai mengenai Gratifikasi ilegal dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan melalui media *Digital Room for E-leArning Modules (DREAM)* pada bulan Februari dan September 2023.

- c. Mengedarkan Imbauan melalui Memo Internal terkait Larangan Gratifikasi Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1444 H ke seluruh unit kerja di Bulan Maret 2023.
 - d. Branch Visit Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) dalam rangka internalisasi Gratifikasi ke Kantor Cabang.
 - e. Melaksanakan Sosialisasi Perempuan dan Pencegahan Korupsi Dalam Keluarga kepada Istri Pegawai di Menara Bank BTN pada bulan Maret 2023.
 - f. Diseminasi gratifikasi melalui pemasangan poster di *Banking Hall* Kantor Cabang.
 - g. Internalisasi pemahaman mengenai gratifikasi melalui penayangan video "Menenal Gratifikasi" pada media digital internal Bank BTN Smartshare.
 - h. Sosialisasi infografis Pesan Anti Gratifikasi terkait Larangan Gratifikasi Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1444 H kepada stakeholder melalui sosial media facebook, twitter, dan instagram pada Bulan April 2023.
 - i. Sosialisasi infografis Pesan Anti Gratifikasi terkait Larangan Gratifikasi Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1444 H kepada stakeholder melalui surat kabar Sindonews pada Bulan April 2023.
 - j. Sosialisasi infografis Pesan Anti Gratifikasi terkait Larangan Gratifikasi Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1444 H melalui pemasangan *twibbon* anti gratifikasi pada Bulan April 2023.
 - k. Webinar *Best Practice* Pengendalian Gratifikasi dan Strategi Pencegahan Korupsi Sektor Dunia Usaha dengan Narasumber Direktur Gratifikasi KPK pada Bulan Mei 2023.
 - l. Sosialisasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan Gratifikasi kepada seluruh Vendor/Mitra pengadaan barang dan jasa di Hotel Aston Sentul pada Bulan Juni 2023.
 - m. Sosialisasi kepada *Stakeholder* BTN (internal maupun eksternal) tentang Pengendalian Gratifikasi, Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan WBS melalui website BTN pada Bulan Juli 2023.
 - n. Melaksanakan Lomba Design Poster Anti Gratifikasi kepada seluruh Pegawai pada Bulan Agustus 2023.
 - o. Internalisasi melalui memo internal imbauan tolak gratifikasi terkait Hari Raya Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 kepada seluruh pegawai pada Bulan Desember 2023.
 - p. Internalisasi Infografis Pesan Anti Gratifikasi terkait Hari Raya Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 kepada seluruh pegawai melalui aplikasi B-Gate, whatsapp blast dan email blast pada Bulan Desember 2023.
 - q. Sosialisasi infografis Pesan Anti Gratifikasi terkait Hari Raya Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 kepada stakeholder melalui sosial media facebook, twitter, dan instagram pada Bulan Desember 2023.
 - r. Pemasangan poster tema Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) di Menara Bank BTN pada Bulan Desember 2023.
 - s. Internalisasi infografis tema Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) kepada seluruh pegawai melalui aplikasi B-Gate, whatsapp blast dan email blast pada Bulan Desember 2023.
 - t. Sosialisasi infografis tema Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) melalui pemasangan umbul-umbul Hakordia di lingkungan Bank pada Bulan Desember 2023.
 - u. Sosialisasi infografis tema Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) kepada stakeholder melalui sosial media facebook, twitter, dan instagram pada Bulan Desember 2023.
 - v. Menyelenggarakan acara puncak peringatan Hari Antikorupsi Sedunia di lingkungan internal Bank pada tanggal 21 Desember 2023.
 - w. Pemberian Penghargaan kepada Pelapor Gratifikasi dengan kategori jumlah laporan terbanyak, nominal terbanyak dan pelapor inspiratif.
2. Penandatanganan Pakta Integritas, Perseroan memiliki program penandatanganan Pakta Integritas yang sejalan dengan komitmen atas pelaksanaan sertifikasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP). Pakta Integritas tersebut merupakan pernyataan seluruh jajaran Perseroan untuk berkomitmen menjunjung tinggi moral dan integritas, melindungi dan menjaga citra, kredibilitas serta kepentingan Perseroan dengan cara tidak meminta atau menerima suap maupun gratifikasi dari pihak-pihak yang memiliki benturan kepentingan. Pakta Integritas tersebut senantiasa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya guna mendukung program SMAP maupun pengendalian gratifikasi. Pakta Integritas yang ditandatangani oleh masing-masing pegawai diunggah melalui media Digital Room For E-learning Modules (DREAM).
 3. *Digital Learning* tentang Pengendalian Gratifikasi Internalisasi kepada seluruh Pegawai tentang materi Pengendalian Gratifikasi dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan salah satunya melalui program *Compliance Excellence* menggunakan media *Digital Room For E-learning Modules* (DREAM) serta melakukan evaluasi terkait materi dimaksud berupa penyelenggaraan *quiz* dan *feedback* atas materi yang diberikan.
 4. Laporan Rencana Kerja Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) kepada KPK
Berdasarkan surat KPK perihal Pedoman Monitoring dan Evaluasi Implementasi Pengendalian Gratifikasi tahun 2023, maka setiap Semester Perseroan wajib menyampaikan laporan Rencana Kerja kepada KPK melalui aplikasi Gratifikasi Online (GOL) KPK. Perseroan telah menyampaikan laporan Rencana Kerja PPG Semester I sampai dengan II kepada KPK dengan rincian yang terdiri sebagai berikut:
 - a. Laporan Diseminasi media sosialisasi pesan anti gratifikasi;
 - b. Laporan *e-learning* Bimbingan Teknis Pengendalian Gratifikasi;

- c. Laporan sosialisasi gratifikasi secara mandiri oleh UPG;
- d. Bimbingan teknis terkait implementasi PPG;
- e. Laporan penerimaan;
- f. Penolakan gratifikasi yang dikelola oleh UPG; dan/atau
- g. Laporan Inovasi pengendalian gratifikasi.

5. Penyampaian apresiasi kepada pelapor gratifikasi terpilih pada perayaan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2023 sesuai Surat Edaran KPK perihal peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) tahun 2023 yang diperingati setiap tanggal 9 Desember, KPK menghimbau agar seluruh Kementerian/Lembaga menyelenggarakan rangkaian kegiatan peringatan Hakordia 2023 dengan mengusung tema "Sinergi Berantas Korupsi, Untuk Indonesia Maju".

Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan memberikan apresiasi kepada Pegawai yang melaporkan gratifikasi dan berkomitmen terhadap pencegahan korupsi di lingkungan Perseroan sehingga diharapkan apa yang telah dilakukan oleh Pelapor Gratifikasi menjadi inspirasi bagi Pegawai lainnya untuk memiliki komitmen yang sama dalam pencegahan korupsi salah satunya melalui penolakan dan pelaporan Gratifikasi.

Apresiasi diberikan kepada pelapor gratifikasi pada tahun 2023 dengan 3 (tiga) kategori yaitu:

- a. Kategori pelapor gratifikasi dengan jumlah laporan terbanyak.

- b. Kategori pelapor gratifikasi dengan jumlah nominal terbanyak.
- c. Kategori Pelapor Inspiratif.

Selain penghargaan kepada pelapor gratifikasi, apresiasi juga diberikan kepada pemenang lomba design poster anti gratifikasi, Pegawai API Teraktif dari KPK dan simbolis Pemasangan Rompi API kepada 2 (dua) perwakilan pegawai Ahli Pembangun Integritas (API) Utama dan Muda Angkatan Tahun 2023.

Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

Sebagai Badan Usaha Milik Negara, Perseroan secara konsisten berupaya menjaga kepatuhan terhadap penyampaian LHKPN. Dasar ketentuan pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Perseroan adalah Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 07 Tahun tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Kebijakan Pengelolaan LHKPN Perseroan

Perseroan berkomitmen terhadap pelaksanaan kewajiban LHKPN dengan diterbitkannya Kebijakan Khusus No. 3-C tanggal 31 Oktober 2023 perihal Regulasi dan Administrasi Kepegawaian, Bab VII tentang Pelayanan dan Operasional *Human Capital*. Berdasarkan Kebijakan Khusus tersebut, Pejabat di lingkungan Perseroan yang wajib melaporkan LHKPN adalah sebagai berikut:

1. Jajaran Direksi, Dewan Komisaris dan Organ Dewan Komisaris.
2. Kepala Divisi/Desk (atau yang setingkat), Kepala Kantor Wilayah.
3. Kepala Cabang dan Kepala Cabang Syariah.

Jumlah Pelaporan LHKPN

No	Kategori Jabatan	Jumlah	%Pelaporan
1	Dewan Komisaris	8	100%
2	Direksi	9	100%
3	SEVP	2	100%
4	Kepala Divisi	42	100%
5	Kepala Kantor Wilayah	6	100%
6	Kepala Cabang	108	100%
	Total Wajib Lapor	175	100%

No	Tahun	Jenis Laporan	Jumlah Wajib Laporkan	Jumlah Pelaporan	%Kepatuhan
1	2020	Periodik Tahun 2019	158	157	99,37%
2	2021	Periodik Tahun 2020	162	162	100%
3	2022	Periodik Tahun 2021	170	170	100%
4	2023	Periodik Tahun 2022	175	175	100%

- Seluruh pejabat BUMN wajib melaporkan LHKPN Tahun Periodik 2022 secara *online* 01 Januari 2023 s.d. 31 Maret 2023, dimana apabila terdapat Pejabat BUMN yang tidak memenuhi kewajiban tersebut dapat dikenakan sanksi Administratif.
- Berdasarkan hal tersebut Report Kepatuhan Bank BTN atas Pelaporan LHKPN sebesar 100% atau seluruh Wajib Laporkan telah menyelesaikan pelaporan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan, dimana Tingkat kepatuhan dapat dipertahankan. (posisi 31 Maret 2023)

Jumlah Penyimpangan (*Internal Fraud*) dan Upaya Penyelesaian

Internal Fraud dalam 1 Tahun	Jumlah fraud yang dilakukan (Internal)					
	Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya (2022)	Tahun Berjalan (2023)	Tahun Sebelumnya (2022)	Tahun Berjalan (2023)	Tahun Sebelumnya (2022)	Tahun Berjalan (2023)
Total Fraud	0	0	18	19	1	0
Telah Diselesaikan	0	0	10	17	1	0
Dalam Proses Penyelesaian di Internal Bank	0	0	7	2	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaian	0	0	0	0	0	0
Telah Ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum	0	0	1	2	0	0

Keterangan:

- Jumlah kasus pada tahun berjalan adalah berdasarkan Laporan Hasil Audit Khusus dan Laporan Hasil Telaah Awal periode Januari s.d. Desember 2023.
- Jumlah kasus yang **"Telah diselesaikan"** adalah kasus yang telah mendapatkan putusan sanksi dari Direksi sampai dengan Desember 2023.
- Jumlah kasus yang **"Dalam proses penyelesaian di internal Perseroan"** adalah kasus yang belum mendapatkan putusan sanksi dari Direksi sampai dengan Desember 2023.
- Jumlah kasus yang **"Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum"** adalah kasus yang **"telah diselesaikan"** dan mendapatkan putusan sanksi pidana. Proses hukum ditindaklanjuti oleh Legal Division.

Pemberian Dana Kegiatan Sosial dan/atau Politik

Pemberian Dana Kegiatan Sosial menjadi bagian dari tanggung jawab sosial Perseroan. Oleh karena itu, informasi terkait Pemberian Dana Kegiatan Sosial diuraikan pada bagian Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Laporan Tahunan ini.

Sedangkan untuk pemberian dana kegiatan politik, selama tahun 2023 Perseroan tidak melakukan pemberian dana untuk kegiatan politik atau kepada partai politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun *Code of Conduct* Perseroan.

Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar

Perseroan melakukan penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposure*) yang dilakukan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan. Perseroan tidak pernah melanggar Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) selama tahun 2023. Direktur Kepatuhan melalui Satuan Kerja Kepatuhan senantiasa memantau kepatuhan Perseroan terhadap ketentuan BMPK dan melaporkannya kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap semester. Penerapan penyediaan dana oleh Perseroan kepada pihak terkait dan/atau penyediaan dana besar senantiasa memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun perundang-undangan yang berlaku dan telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia tentang BMPK.

No	Penyedia Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal (juta rupiah)
1	Kepada Pihak Terkait	48	8.556
2	Kepada Debitur Inti: a. Individu b. Group	10 205	6.882.986 28.084.964

Buyback Saham dan Buyback Obligasi

Selama tahun 2023, tidak terdapat *buyback* saham maupun *buyback* obligasi.

Rencana Strategis Bank

Informasi terkait Rencana Strategis Bank telah disajikan pada Sub Bab Strategi Bank pada Bab Analisis dan Pembahasan Manajemen dalam Laporan Tahunan ini.

Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Penjelasan terkait Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan telah tersaji pada Bab Analisis dan Pembahasan Manajemen dalam Laporan Tahunan ini.

Perselisihan Internal

Selama tahun 2023 tidak ada perselisihan internal antar pegawai yang terjadi.

Pencegahan Transaksi Orang Dalam (*Insider Trading*)

Sebagai bagian dari pengelolaan potensi benturan kepentingan, Perseroan telah menetapkan kebijakan terkait tindakan Transaksi Orang Dalam (*Insider Trading*) yang diatur dalam Peraturan Direksi No. 39/PD/CSD/2011 tentang Pedoman Kebijakan Kegiatan Investor Relations serta Pedoman Tata Tertib Kerja Direksi maupun Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris. Dalam ketentuan tersebut,

diatur bahwa Orang Dalam Perseroan dilarang melakukan kegiatan Transaksi Orang Dalam (*Insider Trading*) melalui kegiatan pembelian atau penjualan atas Efek Perseroan atau Perusahaan lain yang melakukan transaksi dengan Perseroan. Orang Dalam dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Komisaris, Direktur, atau Pegawai Perseroan;
2. Pemegang saham utama Perseroan;
3. Orang perseorangan yang karena kedudukan atau profesinya atau karena hubungan usahanya dengan Perseroan memungkinkan orang tersebut memperoleh informasi orang dalam; atau
4. Pihak yang dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir tidak lagi menjadi pihak sebagaimana dimaksud pada butir 1,2, dan 3 di atas.

Larangan bagi Orang Dalam Perseroan yang mempunyai informasi Orang Dalam untuk melakukan pembelian atau penjualan atas Efek Perseroan didasarkan atas pertimbangan adanya Prinsip Keterbukaan pada Pasar Modal yang berakibat harus terciptanya kesetaraan informasi bagi setiap pihak di dalam mengambil keputusan investasinya. Orang Dalam dilarang memperdagangkan Efek Perseroan bila mengetahui Informasi material yang dimiliki oleh Orang Dalam yang belum tersedia untuk umum (dhi. Informasi Orang Dalam) atau Fakta Material. Orang Dalam yang sebelumnya mengetahui Fakta Material dapat melakukan perdagangan Efek setelah Fakta Material tersebut dipublikasikan. Selama tahun 2023, tidak terdapat *insider trading*.

Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

Uraian terkait Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan telah tersaji pada Sub Bab Transparansi Penyampaian Laporan pada Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Penerapan Keuangan Berkelanjutan, Termasuk Penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Penjelasan tentang penerapan keuangan berkelanjutan, termasuk penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan telah dijelaskan pada *Sustainability Report* Bank BTN Tahun 2023.

Laporan Tata Kelola Unit Usaha Syariah —

Perseroan melaksanakan Tata Kelola Unit Usaha Syariah (UUS) bertujuan untuk memperoleh pengelolaan Perseroan yang sesuai dengan 5 (lima) prinsip dasar GCG dan sesuai dengan Prinsip Syariah serta ditujukan untuk kepentingan yang lebih luas. Kepentingan yang dimaksud antara lain adalah untuk melindungi kepentingan *stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum pada industri perbankan syariah.

Kebijakan mengenai pengelolaan UUS Perseroan merujuk pada beberapa ketentuan antara lain:

1. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah tanggal 16 Juli 2008.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah.
3. Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
4. Surat Edaran Bank Indonesia No.12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
5. Surat Keputusan Direksi Nomor 52/SK/DIR/TPMD/2021 tentang Struktur Organisasi Kantor Pusat dan Kantor Wilayah.
6. Anggaran Dasar Perseroan.

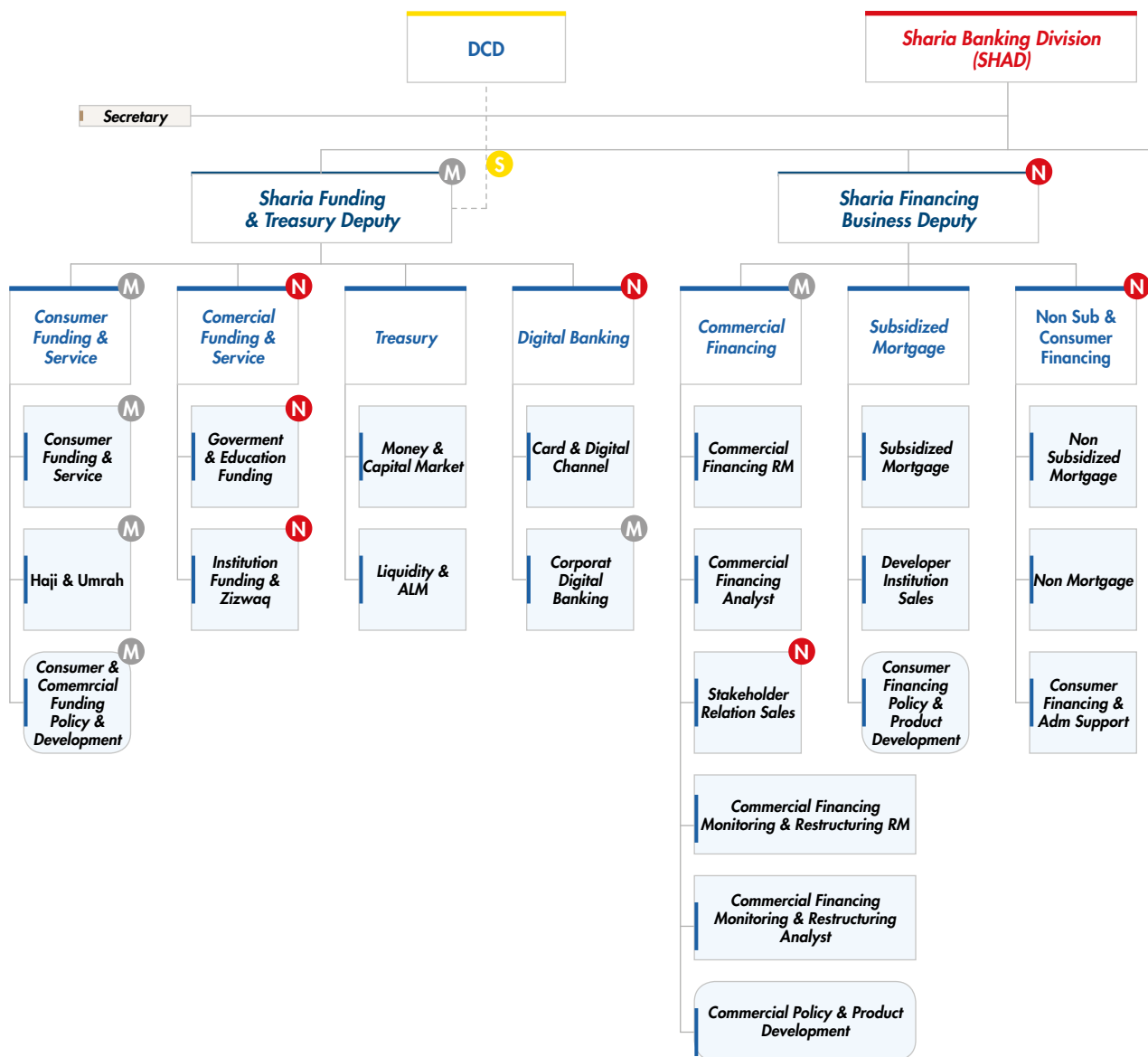
5 (Lima) Prinsip Dasar Penerapan Tata Kelola UUS Perseroan

Perseroan senantiasa konsisten dalam menerapkan dan meningkatkan Pengelolaan UUS melalui peningkatan layanan kepada para nasabah dan *stakeholder* secara berkesinambungan dengan tetap mengacu kepada Prinsip Syariah yang berlandaskan kepada 5 (lima) prinsip dasar GCG, yaitu:

1. **Transparansi:** yaitu keterbukaan dalam menyajikan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
2. **Akuntabilitas:** yaitu kejelasan dan kebenaran penyajian informasi mengenai pengelolaan Perseroan yang berjalan dengan efektif sesuai dengan tujuan.
3. **Pertanggungjawaban:** yaitu pengelolaan Perseroan yang selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan UUS yang sehat.
4. **Profesionalisme:** yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun serta memiliki komitmen tinggi dalam mengembangkan usaha Syariah.
5. **Kewajaran:** yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak dan kepentingan *stakeholders* berdasarkan perjanjian peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Struktur Unit Usaha Syariah Perseroan

Struktur Organisasi Unit Usaha Syariah (UUS) Perseroan dikelola oleh Direksi UUS, Kepada Divisi UUS dan Deputi UUS yang diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah sebagaimana Struktur pengelola UUS disajikan dalam gambar berikut:



Visi dan Misi Unit Usaha Syariah

Dalam menjalankan operasionalnya, UUS Perseroan memiliki Visi dan Misi sebagai berikut:

Visi

"Menjadi Bank Syariah yang Terdepan Dalam Pembiayaan Perumahan dan Industri Kaitannya".

Misi

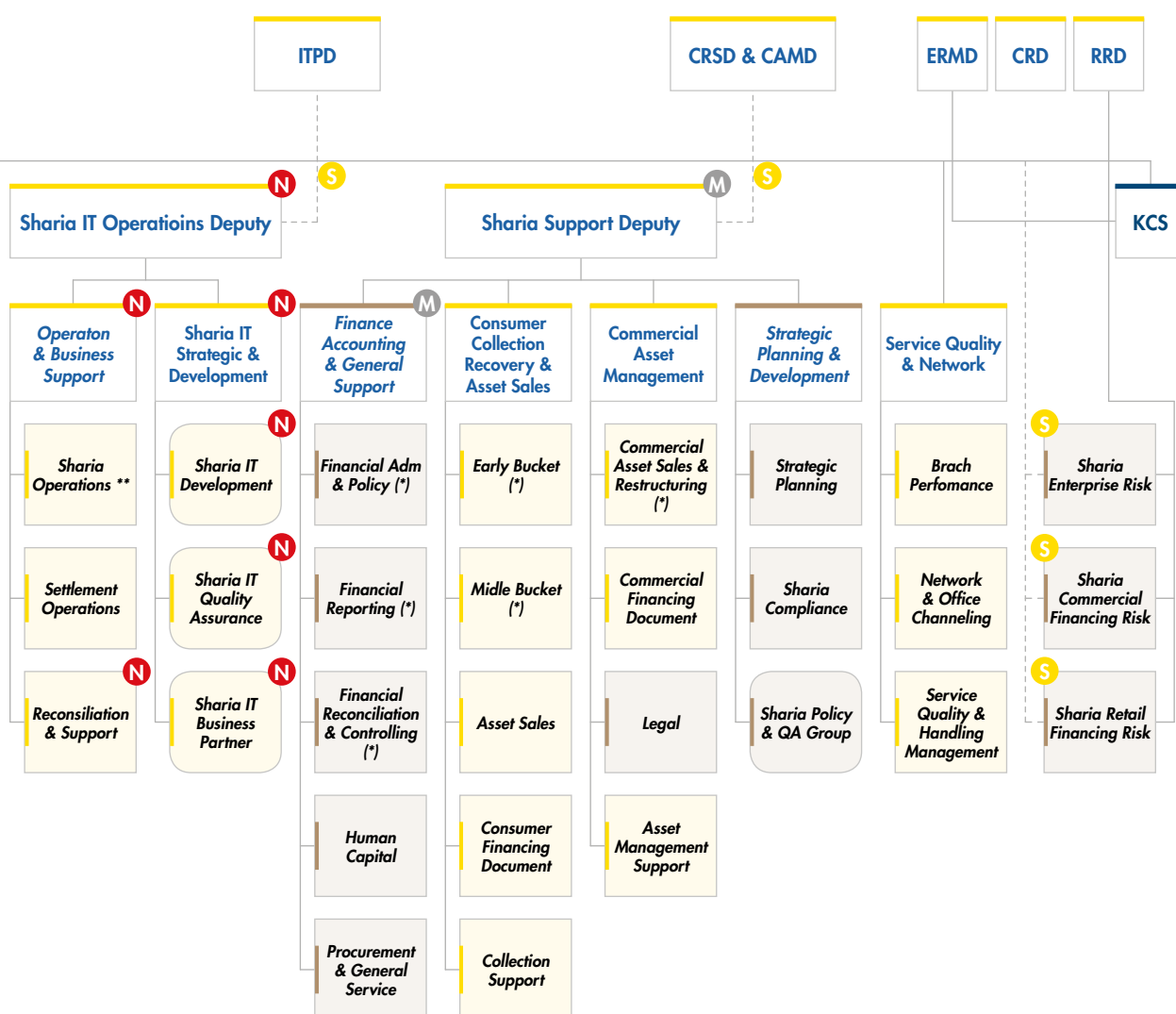
Dalam mencapai visi tersebut di atas, Perseroan akan mengemban misi sebagai berikut:

1. Menyediakan produk dan jasa yang inovatif serta layanan unggul yang fokus pada pembiayaan perumahan dan industri ikutannya dengan sumber pendanaan murah;

2. Mengembangkan *human capital* yang berkualitas dan memiliki integritas tinggi serta penerapan *Good Corporate Governance* dan *Compliance*;
3. Meningkatkan keunggulan kompetitif melalui teknologi informasi terkini;
4. Mempedulikan kepentingan masyarakat dan lingkungan

Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Untuk menjaga agar Lembaga Keuangan Syariah (LKS) pada tataran implementasinya tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syari'ah, maka dalam menjalankan aktivitasnya Perseroan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan usahanya agar sesuai dengan prinsip Syariah (Pasal 1 angka 14 POJK Nomor 12 Tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah).



Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah

Persyaratan diangkatnya seseorang menjadi anggota DPS harus memenuhi kriteria antara lain sebagai berikut:

1. Integritas, paling kurang mencakup:
 - a. Memiliki akhlak dan moral yang baik.
 - b. Cakap melakukan perbuatan hukum.
 - c. Memiliki komitmen untuk mematuhi dan melaksanakan dengan penuh profesionalisme piagam Dewan Pengawas Syariah, ketentuan perbankan syariah serta ketentuan perundang-undangan lain yang berlaku.
 - d. Memiliki komitmen terhadap pengembangan perbankan syariah yang sehat dan tangguh.
 - e. Tidak termasuk dalam Daftar Kepatutan dan Kelayakan (Daftar tidak Lulus) sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh OJK.
- f. Tidak pernah melakukan *fraud* (penipuan, penggelapan dan/atau kecurangan) di bidang perbankan, keuangan dan bidang usaha lainnya, tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan (yang dibuktikan dengan surat pernyataan pribadi).
2. Kompetensi, paling kurang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah muamalah telah memperoleh persetujuan/surat rekomendasi dari DSN-MUI dan pengetahuan di bidang perbankan dan/ atau keuangan secara umum. Dalam rangka meningkatkan kompetensinya, anggota DPS harus bersedia secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan termasuk mengikuti program orientasi (*induction program*) yang bertujuan untuk memberikan masukan kepada yang bersangkutan agar memperoleh pemahaman tentang Bank dalam waktu relatif singkat sehingga dapat melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien.

3. Reputasi, paling kurang dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan dan selama menjabat:
 - a. Tidak termasuk dalam daftar hitam (*blacklist*) dan daftar kredit macet OJK.
 - b. Tidak pernah dinyatakan pailit.
 - c. Tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Direksi suatu perseroan dan/atau anggota pengurus suatu badan usaha yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dan/atau badan usaha dinyatakan pailit.
 - d. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
 - e. Tidak pernah menjadi Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - 1) Pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan.
 - 2) Pertanggungjawabannya pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris kepada RUPS.
 - 3) Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan Laporan Tahunan dan/atau Laporan Keuangan kepada OJK.

Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah

Penetapan anggota DPS Perseroan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Komite Remunerasi dan Nominasi memberikan rekomendasi calon anggota DPS kepada Dewan Komisaris.
2. Dalam hal anggota Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*) dengan calon anggota DPS, maka dalam rekomendasi wajib diungkapkan.
3. Berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi, Dewan Komisaris melalui Direksi mengusulkan calon DPS kepada DSN-MUI.
4. DSN-MUI memberikan rekomendasi atau tidak memberikan rekomendasi atas usulan penetapan calon anggota DPS yang disampaikan oleh Direksi.
5. Direksi wajib mengajukan permohonan persetujuan kepada OJK atas calon anggota DPS yang telah mendapatkan rekomendasi dari DSN-MUI.
6. OJK memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan atas calon anggota DPS yang diusulkan.
7. RUPS mengangkat anggota DPS yang telah mendapat rekomendasi DSN-MUI dan persetujuan OJK.
8. Dalam hal pengangkatan anggota DPS oleh RUPS dilakukan sebelum adanya persetujuan OJK, pengangkatan anggota DPS tersebut wajib dilaporkan oleh Bank ke OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal pengangkatan.
9. Calon anggota DPS yang belum dinyatakan efektif, tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota DPS dan tidak dapat membuat keputusan yang mengikat secara hukum, dan oleh karenanya belum melekat hak dan kewajibannya sebagai anggota DPS.

10. Dalam hal anggota DPS tidak diangkat oleh RUPS dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal dimaksud menjadi tidak berlaku.

Susunan, Jumlah dan Komposisi Dewan Pengawas Syariah

Pengangkatan DPS Perseroan telah berdasarkan pada persyaratan DPS sesuai dengan POJK Nomor 12 Tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah yaitu Anggota DPS harus memiliki integritas, kompetensi dan reputasi dalam bidang keuangan. Komposisi keanggotaan DPS yang telah diatur dalam Piagam Dewan Pengawas adalah sebagai berikut:

1. Jumlah anggota DPS minimal 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.
2. DPS dipimpin oleh seorang Ketua yang ditunjuk dari salah satu anggota DPS.
3. Anggota DPS diangkat oleh RUPS Bank.

Perubahan dan Komposisi Dewan Pengawas Syariah Selama Tahun 2023

Informasi terkait Perubahan dan Komposisi DPS dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan di bagian Profil Dewan Pengawas Syariah Perseroan dalam Laporan Tahunan ini

Profil Dewan Pengawas Syariah Perseroan

Informasi terkait pendidikan, pengalaman kerja, periode penugasan DPS, jabatan rangkap dan hubungan afiliasi dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan di bagian Profil Dewan Pengawas Syariah Perseroan dalam Laporan Tahunan ini

Masa Jabatan Dewan Pengawas Syariah

Masa jabatan anggota DPS adalah terhitung sejak tanggal yang ditentukan pada RUPS yang mengangkatnya sampai penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Anggota DPS yang telah selesai masa jabatannya dapat diangkat kembali dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Pedoman Kerja, Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

DPS telah memiliki Piagam Dewan Pengawas Syariah yang disahkan melalui Surat Keputusan Dewan Pengawas Syariah Nomor 01/DPS-BTN/III/2023 tanggal 31 Maret 2023. Piagam Dewan Pengawas Syariah disusun berdasarkan prinsip-prinsip prinsip syariah, ketentuan Anggaran Dasar, peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, arahan Pemegang Saham serta praktek-praktek terbaik (*best practices*) *Good Corporate Governance*.

Piagam Dewan Pengawas Syariah dapat memberikan panduan pelaksanaan tugas bagi DPS dengan lebih terarah dan efektif. Adapun isi Piagam Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut:

Bagian I	Ketentuan Umum, Tujuan Pembentukan Piagam Dewan Pengawas Syariah
Bagian II	Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Dewan Pengawas Syariah
Bagian III	Keanggotaan, Komposisi Keanggotaan DPS
Bagian IV	Remunerasi dan Fasilitas, Rapat, Risalah
Bagian V	Unit Kerja Pendukung Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab DPS
Bagian VI	Lain-lain

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

DPS memiliki tugas dan tanggung jawab memberikan nasihat dan saran kepada Direktur UUS serta mengawasi kegiatan UUS agar sesuai dengan prinsip syariah. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS meliputi antara lain:

1. Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk terkait syariah yang dikeluarkan Perseroan.
2. Mengawasi proses pengembangan produk baru yang terkait Syariah agar sesuai dengan fatwa DSN-MUI.
3. Memberikan opini syariah terhadap produk baru dan/atau pembiayaan yang direstrukturisasi yang terkait syariah dengan mengacu antara lain pada fatwa DSN-MUI dan ketentuan yang mengatur mengenai pelaksanaan prinsip syariah dan kegiatan usaha UUS.
4. Meminta fatwa kepada DSN-MUI untuk produk baru terkait syariah yang belum ada fatwanya.
5. Melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Perseroan.
6. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja yang menjalankan dan/atau terkait aktivitas syariah dalam rangka pelaksanaan tugasnya.
7. DPS wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (GCG).
8. Melakukan pengawasan terhadap pengembangan produk baru Perseroan terkait syariah:
 - a. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat Perseroan yang berwenang mengenai tujuan, karakteristik dan akan yang digunakan dalam produk baru terkait syariah yang akan dikeluarkan.
 - b. Memastikan ketersediaan akan yang digunakan dalam produk baru terkait syariah dalam fatwa DSN-MUI:
 - 1) Dalam hal telah terdapat fatwa, maka DPS melakukan kajian atas kesesuaian akad produk baru dengan fatwa DSN-MUI.
 - 2) Dalam hal belum terdapat fatwa, maka DPS mengusulkan kepada Direksi Perseroan untuk melengkapi akad produk baru terkait syariah dengan fatwa dari DSN-MUI.
 - c. Melakukan Review sistem dan prosedur dari produk baru yang akan dikeluarkan terkait dengan pemenuhan prinsip syariah.
 - d. Memberikan pendapat syariah atas produk baru yang akan dikeluarkan Bank.
 - e. Melakukan evaluasi pemenuhan prinsip syariah atas kebijakan dan prosedur untuk mengelola risiko yang melekat pada produk dan/atau aktivitas baru Bank.
9. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan UUS.
 - a. Melakukan analisa laporan yang disampaikan oleh dan/atau yang diminta dari Direksi, pelaksanaan fungsi audit intern dan/atau fungsi kepatuhan untuk mengetahui kualitas pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah atas kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dan serta pelayanan jasa Perseroan.
 - b. Menetapkan jumlah uji petik (sampel) transaksi yang akan diperiksa dengan memperhatikan kualitas pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah dari masing-masing kegiatan.
 - c. Memeriksa dokumen transaksi yang diuji petik (sampel) untuk mengetahui pemenuhan prinsip syariah sebagaimana dipersyaratkan dalam kebijakan internal, antara lain:
 - Ketersediaan dokumen bukti pembelian barang, untuk akad murabahah sebagai bukti terpenuhinya syarat jual beli murabahah.
 - Ketersediaan dokumen laporan usaha nasabah, untuk akad mudharabah/musarakah, sebagai dasar melakukan perhitungan distribusi bagi hasil.
 - d. Melakukan inspeksi, pemeriksaan, permintaan keterangan dan/atau konfirmasi kepada pegawai UUS dan/atau nasabah untuk memperkuat hasil pemeriksaan dokumen, apabila diperlukan.
 - e. Melakukan review terhadap kebijakan internal terkait aspek syariah apabila terdapat indikasi ketidaksesuaian pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah atas kegiatan dimaksud.
 - f. Memberikan pendapat syariah atas kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa UUS.
 - g. Melaporkan hasil pengawasan DPS kepada OJK menggunakan format yang ditetapkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode semester berakhir.
 - h. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
10. Manajemen Risiko Perseroan:
 - a. Melakukan evaluasi (review) atas kebijakan manajemen risiko UUS yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.
 - b. Melakukan evaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah paling kurang secara triwulan.

Kebijakan Rangkap Jabatan Dewan Pengawas Syariah

Anggota DPS dapat merangkap jabatan sebagai anggota DPS paling banyak pada 4 (empat) Lembaga Keuangan Syariah lain dengan memprioritaskan pada perusahaan yang terafiliasi dengan kelompok usaha Perseroan. Anggota DPS dilarang merangkap jabatan sebagai konsultan di seluruh BUS dan/atau UUS di wilayah Indonesia.

Nama	Jabatan	Jabatan pada Perusahaan/Instansi Lain	Nama Perusahaan/Instansi Lain
Prof. Dr. Muhammad Quraish Shihab, MA	Ketua DPS	Ketua DPS	CIMB Niaga
Dr. Mohamad Hidayat, MBA, MH*	Anggota DPS	Anggota DPS	Bank Syariah Indonesia (BSI)
		Ketua DPS	Asuransi BRIngin Life Syariah
		Ketua DPS	AJ Manulife Syariah
Mohammad Bagus Teguh Perwira, LC. MA	Anggota DPS	Anggota DPS	OCBC NISP
		Anggota DPS	Maybank Indonesia
		Ketua DPS	Manulife Aset Manajemen Indonesia
Muhammad Faiz, Lc., M.A.**	Anggota DPS	Anggota DPS	PT Indomobil Multi Finance Indonesia Syariah
		Anggota DPS	Unit Usaha Syariah PT Bank Permata, Tbk
		Anggota DPS	PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Syariah

*Berhenti menjabat sejak 16 Maret 2023 berdasarkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun 2023.

**Mulai menjabat sejak 29 November 2023.

Pengelolaan Benturan Kepentingan Dewan Pengawas Syariah

Anggota DPS harus menghindari terjadinya potensi benturan kepentingan atau selalu menempatkan diri untuk tidak berada dalam potensi terjadinya benturan kepentingan dalam situasi apapun. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota DPS dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perseroan dan wajib mengungkapkan potensi benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan dan menyampaikan kepada Dewan Komisaris.

Anggota DPS harus tunduk pada ketentuan lainnya terkait benturan kepentingan dan ketentuan lainnya yang berlaku bagi Perseroan. Prosedur yang harus dilalui oleh anggota DPS apabila terjadi benturan kepentingan adalah sebagai berikut:

1. Wajib untuk segera melaporkan secara tertulis kepada Dewan Komisaris mengenai semua hal yang berpotensi menciptakan dan/atau mengandung benturan kepentingan yang berdampak signifikan dalam segi finansial maupun reputasi untuk Perseroan, Dewan Komisaris, DPS dan Direksi.
2. Tidak diperbolehkan untuk turut serta dalam proses penilaian terhadap semua kegiatan yang mengandung benturan kepentingan tersebut.
3. Dapat ikut serta dalam rapat, namun tidak diperkenankan untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan.

Kepemilikan Saham Dewan Pengawas Syariah

Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham			
		Bank BTN	Bank Lain	Lembaga Keuangan Non Bank	Perusahaan Lain
Prof. Dr. H. Muhammad Quraish Shihab, MA	Ketua	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Dr. H. Mohamad Hidayat, MBA, MH*	Anggota	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
H. Mohammad Bagus Teguh Perwira, Lc, MA	Anggota	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Muhammad Faiz, Lc., M.A.**	Anggota DPS	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

*Berhenti menjabat sejak 16 Maret 2023 berdasarkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun 2023.

**Mulai menjabat sejak 29 November 2023

Laporan Pelaksanaan Kegiatan DPS

Rapat Internal Dewan Pengawas Syariah

No	Tanggal	Pembahasan	Peserta	Kehadiran
1	19 Januari 2023	Permohonan Opini <i>New Mobile Banking</i>	DPS dan Manajemen UUS	Seluruh DPS hadir
		Permohonan Opini <i>One Billing</i> (Penyeragaman Tanggal Angsuran Nasabah)		
		<i>Project Tiger</i>		
		<i>Highlight Kinerja UUS Bulan Desember 2022</i>		
2	16 Februari 2023	Permohonan Opini Rencana Penyaluran Dana Tidak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan (TBDSP) Tahun 2023	DPS dan Manajemen UUS	Seluruh DPS hadir
		Permohonan Opini Kebijakan Khusus Giro BTN iB		
		<i>Highlight Kinerja UUS Bulan Januari 2023</i>		
3	14 Maret 2023	Permohonan Opini Tabungan BTN Emas iB	DPS dan Manajemen UUS	Seluruh DPS hadir
		Piagam DPS Tahun 2023		
		<i>Highlight Kinerja UUS Bulan Februari 2023</i>		
4	17 April 2023	<i>Highlight Kinerja UUS Bulan Maret 2023</i>	DPS dan Manajemen UUS	Seluruh DPS hadir
		Agenda Dewan Pengawas Syariah (DPS)		
5	23 Mei 2023	<i>Highlight Kinerja UUS Bulan April 2023</i>	DPS dan Manajemen UUS	Seluruh DPS hadir
		Hasil Evaluasi Uji Petik dan Monitoring Uji Petik		
6	09 Juni 2023	Permohonan Opini Usulan Penyesuaian Nisbah <i>Counter Giro Prima BTN iB</i>	DPS dan Manajemen UUS	Seluruh DPS hadir
		Permohonan Opini Pelaksanaan Trading Surat Berharga		
		Permohonan Opini Tata Cara Pembayaran Asuransi Pembiayaan KPR BTN Bersubsidi iB		
		Permohonan Opini Penyesuaian Pelunasan Dipercepat KPR BTN iB		
7	24 Juli 2023	Permohonan Opini Usulan Pembiayaan KUR BTN iB	DPS dan Manajemen UUS	Seluruh DPS hadir
		Penyaluran Dana TBDSP 2023		
		Usulan Penyaluran Dana TBDSP Untuk Program Bina Lingkungan Provinsi Kalimantan Timur		
		<i>Highlight Kinerja UUS Bulan Juni 2023</i>		
8	25 Agustus 2023	Permohonan Tanggapan atas Surat dari DPS BP Tapera	DPS dan Manajemen UUS	Seluruh DPS hadir
		Permohonan Opini Pencatatan dan penghapusbukuan Sukuk Ijarah Berlian Laju Tanker		
		Permohonan Opini Pengembangan Produk Tabungan BTN Rumah Tapera iB		
		Permohonan Opini Pembiayaan Investasi Rumah Sakit Muhammadiyah Bengkulu		
		<i>Highlight Kinerja UUS Bulan Juli 2023</i>		
9	1 September 2023	Tindak lanjut pertemuan Direktur Kepatuhan dengan DPS 2022	DPS, Manajemen UUS, Direktur Kepatuhan, dan Compliance and Governance Division (CMGD)	Seluruh DPS hadir
		Overview kinerja UUS per Agustus 2023		
		Peta kepatuhan Kantor Cabang Syariah (KCS)		
		Overview Kegiatan DPS dan Hasil Uji Petik Tahun 2023		
10	25 September 2023	Permohonan Opini Pelaksanaan Transaksi Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah	DPS dan Manajemen UUS	Seluruh DPS hadir
		Permohonan Opini Pemberian Program Poin <i>Reward</i> Kepada Nasabah DPK Retail		
		Laporan Penggunaan Dana TBDSP 2023		
		<i>Highlight Kinerja UUS Bulan Agustus 2023</i>		
11	27 Oktober 2023	<i>Highlight Kinerja UUS Bulan September 2023</i>	DPS dan Manajemen UUS	Seluruh DPS hadir
		Evaluasi Hasil Uji Petik		
		Diskusi Operasional Syariah		

No	Tanggal	Pembahasan	Peserta	Kehadiran
12	27 November 2023	Implementasi Manajemen Risiko Syariah	DPS, Manajemen UUS, dan Enterprise Risk Management Division (ERMD)	Seluruh DPS hadir
		Permohonan Opini Kerjasama Pembinaan dengan Pihak Ketiga		
		Rencana Kerja DPS Tahun 2024		
		Highlight Kinerja UUS Bulan Oktober 2023		
13	20 Desember 2023	Pengembangan Kerjasama Pemasaran Aktivitas Bancassurance	DPS dan Manajemen UUS	Seluruh DPS hadir

Frekuensi dan Kehadiran Rapat

Nama	Jabatan	Rapat Internal Dewan Pengawas Syariah			Rapat Gabungan Dewan Pengawas Syariah		
		Jumlah dan Persentase Kehadiran			Jumlah dan Persentase Kehadiran		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase
Prof.Dr.H.Muhammad Quraish Shihab, M.A.	Ketua	13	13	100%	2	2	100%
Dr. H. Mohamad Hidayat, M.B.A, M.H.*	Anggota	3	3	100%	0	0	-
H. Mohammad Bagus Teguh Perwira, Lc., M.A.	Anggota	13	13	100%	2	2	100%
Muhammad Faiz, Lc., M.A.**	Anggota	1	1	100%	0	0	-

*Berhenti menjabat sejak 16 Maret 2023 berdasarkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun 2023.

**Mulai menjabat sejak 29 November 2023.

Frekuensi dan Cara Pemberian Nasihat dan Saran Serta Pengawasan Pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal Terhadap Emiten atau Perusahaan Publik

Sepanjang tahun tahun 2023, DPS telah mengeluarkan sebanyak 32 (tiga puluh dua) Opini Dewan Pengawas Syariah. Opini DPS ini dikeluarkan sebagai respon atas perkembangan bisnis UUS Bank BTN agar tetap berjalan sesuai dengan Prinsip Syariah

No	Tanggal	Opini
1	06 Januari 2023	Opini Produk Baru Bank Supply Chain Financing (SCF) BTN iB
2	19 Januari 2023	New Mobile Banking
3	19 Januari 2023	Opini Produk Baru Bank Mobile Banking
4	19 Januari 2023	one Billing
5	19 Januari 2023	Project Tiger
6	16 Februari 2023	Rencana Penyaluran Dana TBDSP Tahun 2023
7	16 Februari 2023	Tanggapan atas Kebijakan Khusus Produk Giro BTN iB
8	14 Maret 2023	Tabungan BTN Emas iB
9	14 Maret 2023	Piagam DPS Tahun 2023
10	28 Maret 2023	Opini produk Baru Bank Tabungan BTN Emas iB
11	31 Maret 2023	Opini produk Baru Bank Kartu ATM/Debit Visa Paywave
12	23 Mei 2023	Biaya Administrasi dan Biaya Proses KPR Bersubsidi BTN iB
13	09 Juni 2023	Penyesuaian Nisbah Counter Giro Prima BTN iB
14	09 Juni 2023	Pelaksanaan Trading Surat Berharga

No	Tanggal	Opini
15	09 Juni 2023	Tata Cara Pembayaran Asuransi Pembiayaan KPR BTN Bersubsidi iB
16	09 Juni 2023	Penyesuaian Pelunasan Dipercepat KPR BTN iB
17	24 Juli 2023	Pembiayaan KUR BTN iB
18	24 Juli 2023	Tearing Prosentase Penyaluran Dana TBDSP 2023
19	24 Juli 2023	Program Bina Lingkungan Provinsi Kalimantan Timur
20	25 Agustus 2023	Pencatatan dan Penghapusbukuan Sukuk Ijarah Berlian Laju Tanker
21	25 Agustus 2023	Pengembangan Produk Tabungan BTN Rumah Tapera iB
22	25 Agustus 2023	Permohonan Rumah Sakit Muhammadiyah Bengkulu
23	25 Agustus 2023	Opini Produk Baru Tabungan BTN Rumah Tapera iB
24	1 September 2023	Persetujuan Atas Pernyataan Kesesuaian Syariah Penerbitan Sukuk Mudharabah Jangka Panjang Yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum Bank Tabungan Negara I Tahun 2023 Tahap I

No	Tanggal	Opini
25	25 September 2023	Pelaksanaan Transaksi Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah.
26	25 September 2023	Pemberian Program Poin Reward Kepada Nasabah DPK Retail
27	25 September 2023	Laporan Penggunaan Dana TBDSP 2023
28	27 November 2023	Kerjasama Pembinaan Dengan Pihak Ketiga
29	20 Desember 2023	Pengembangan Kerjasama Pemasaran Aktivitas Bancassurance
30	27 Desember 2023	Pembiayaan Multimanfaat BTN iB Refinancing dengan akad MMQ
31	27 Desember 2023	Pembiayaan Multiguna (Soft Financing) Pegawai BTN iB dengan akad MMQ
32	27 Desember 2023	Pembiayaan Properti BTN iB Skema Ijarah Muntahiya Bit Tamlik

Penilaian Kinerja Dewan Pengawas Syariah

Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kinerja Dewan Pengawas Syariah

Penilaian kinerja DPS dilakukan untuk periode 1 (satu) tahun. Pada tahap pertama, anggota DPS melakukan penilaian kinerjanya dengan metode *self assessment*. Pada tahap kedua, Komite Remunerasi dan Nominasi akan membicarakan hasil *self assessment* dan penilaian kinerja DPS dan menggunakannya sebagai masukan kepada Dewan Komisaris untuk selanjutnya ditetapkan oleh RUPS Tahunan.

Kriteria Evaluasi Kinerja Dewan Pengawas Syariah

Penilaian kinerja DPS dilakukan dengan melihat pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS selama tahun 2023 yang terdiri dari Aspek Pemberian Pertimbangan/Pengarahan Syariah, Aspek Pengawasan Syariah dan Aspek Pelaporan DPS.

Pihak yang Melakukan Assessment

DPS melakukan penilaian atas kinerja DPS selama tahun 2023 secara mandiri (*self assessment*) yang dilaksanakan di dalam forum rapat internal DPS. Penilaian dilakukan dengan mengevaluasi ketercapaian atas indikator-indikator kinerja DPS selama tahun 2023. Dalam proses evaluasi, DPS berkoordinasi dengan unit kesekretariatan DPS dalam hal tata administrasi, dokumentasi dan data sehingga proses evaluasi kinerja dapat dilakukan secara akurat.

Hasil Penilaian Kinerja Dewan Pengawas Syariah

Selama tahun 2023, DPS telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Di dalam Aspek Pemberian Pertimbangan/Pengarahan Syariah, DPS telah melaksanakan 13 (tiga belas) kali rapat DPS, termasuk di antaranya 1 (satu) kali rapat dengan *Enterprise Risk Management Division* (ERMD) dan 1 (satu) kali rapat dengan Direktur Kepatuhan. DPS selama tahun 2023 telah mengeluarkan sebanyak 32 opini rekomendasi syariah. Untuk Aspek Pengawasan DPS juga telah melakukan kegiatan Uji petik Syariah terhadap jalannya kegiatan operasional KCS dalam rangka memastikan pemenuhan prinsip Syariah atas operasional dan bisnis UUS Bank BTN. Adapun jumlah pelaksanaan kegiatan uji petik tersebut meningkat dari tahun sebelumnya dari sebanyak 10 KCS menjadi 16 KCS. Adapun dalam hal Aspek Pelaporan DPS, di tahun 2023 ini DPS telah melakukan pelaporan atas Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah untuk Semester II Tahun 2022 dan Semester I Tahun 2023 secara tepat waktu. Kinerja tersebut telah memenuhi persyaratan tugas dan tanggung jawab dari Dewan Pengawas Syariah

Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi DPS

Piagam DPS mengatur ketentuan tentang besarnya gaji atau honorarium atau remunerasi dan/atau tunjangan bagi anggota DPS ditetapkan oleh RUPS. Dalam hal RUPS melimpahkan kewenangan penetapan besarnya gaji dan tunjangan tersebut kepada Dewan Komisaris maka penetapan besarnya gaji dan tunjangan tersebut ditetapkan dalam rapat Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.

Remunerasi DPS Tahun 2023

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lainnya	Ketua DPS		Anggota DPS	
	Orang	Juta Rp.	Orang	Juta Rp.
Remunerasi				
Honorarium/Gaji	1	420	1	378
Tunjangan rutin (Tj. PPh21)	1	18	1	16.2
Tunjangan Hari Raya	-	-	-	-
Bonus Kinerja	-	-	-	-
Total Remunerasi (a)	1	438	1	394.2
Asuransi Purna Jabatan	-	-	-	-
Tunjangan Transportasi	-	-	-	-
Total Fasilitas Lainnya (b)	-	-	-	-
Total Diterima (a) + (b)	1	438	1	394.2



Mekanisme Pemberhentian dan Pengunduran Diri Dewan Pengawas Syariah

Jabatan anggota DPS berakhir apabila:

1. Periode masa jabatannya berakhir sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan.
4. Meninggal dunia.
5. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

Adapun mekanisme pengunduran diri DPS adalah sebagai berikut:

1. Seorang anggota DPS berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud pengunduran diri tersebut kepada Direksi sebelum pengunduran dirinya tersebut efektif.
2. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya surat permohonan pengunduran diri anggota DPS tersebut dan mengajukan calon pengganti anggota DPS sebagai ketentuan.
3. Jika dengan pengunduran diri tersebut mengakibatkan jumlah anggota DPS menjadi kurang dari jumlah minimum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Bank wajib mengangkat anggota DPS yang baru sesuai dengan tata cara dan prosedur pengangkatan anggota DPS yang berlaku.
4. Anggota DPS yang mengundurkan diri sebelum masa jabatannya berakhir, maka pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas yang dijalankan sejak pertanggungjawaban yang terakhir sampai dengan pengunduran diri tersebut, efektif tetap harus dimintakan pada RUPS Tahunan yang terdekat.
5. Pemberhentian dan/atau pengunduran diri anggota DPS wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak pemberhentian dan/atau pengunduran diri tersebut efektif.

Direktur Unit Usaha Syariah Perseroan

UUS Perseroan dipimpin oleh Direktur Perbankan Syariah yang bertanggung jawab secara penuh atas pelaksanaan pengelolaan usaha syariah berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah. Pengangkatan Direktur UUS Perseroan telah berdasarkan pada integritas, kompetensi, reputasi keuangan yang memadai, pengalaman di bidang operasional sebagai pejabat eksekutif bank dan telah memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan mengacu pada Peraturan Bank Indonesia No.14/6/PBI/2012 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Saat ini Direktur UUS Perseroan dijabat oleh Sdr. Hirwandi Gafar berdasarkan rapat Direksi tanggal 3 Desember 2019

dan telah mendapatkan persetujuan OJK melalui surat nomor SR-6/PB.1/2021 tanggal 2 Maret 2021 melalui Penegasan atas Penunjukan Direktur UUS PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Profil ringkas beliau dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan di bagian Profil Direksi dalam Laporan Tahunan ini

Tugas dan Tanggung Jawab Direktur UUS

Fokus pada pengelolaan UUS berdasarkan prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, prinsip syariah dan GCG.

Kepala Divisi Usaha Syariah

Direktur UUS dibantu oleh Kepala Divisi Syariah Dalam menjalankan kegiatan operasional UUS Perseroan. Berdasarkan Buku Pedoman Perusahaan Uraian Jabatan Perseroan bahwa tugas dan wewenang Kepala Divisi Syariah di antaranya yaitu:

1. Menetapkan usulan rencana kerja dan anggaran bidang kerjanya sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Memastikan proses perencanaan strategi untuk Unit Usaha Syariah Perseroan.
3. Memastikan penyusunan kebijakan terkait dengan Unit Usaha Syariah Perseroan.
4. Memastikan fungsi kesekretariatan dari Dewan Pengawas Syariah.
5. Memastikan berjalannya kegiatan operasional dan kinerja Unit Usaha Syariah.
6. Mengelola dan mengendalikan risiko yang berada dalam kelolaannya.
7. Menerapkan pelaksanaan GCG di unit kerjanya

Laporan Pelaksanaan Kegiatan UUS Perseroan

Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan GCG Serta Pelaporan Internal

Sepanjang Tahun 2023, Perseroan telah melakukan publikasi laporan keuangan triwulanan baik melalui situs website www.btn.co.id maupun melalui media surat kabar, serta melaporkannya kepada regulator sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu. Rekapitulasi publikasi laporan keuangan triwulanan melalui media surat kabar dan Media Online adalah sebagai berikut:

Triwulan	Surat Kabar	Tanggal
IV-2022	Investor Daily Bisnis Indonesia www.btn.co.id	17 Februari 2023
I-2023	Investor Daily www.btn.co.id	27 April 2023
II-2023	www.btn.co.id	21 Juli 2023
III-2023	Bisnis Indonesia www.btn.co.id	28 November 2023

Daftar Konsultan, Penasihat atau yang Dipersamakan Dengan itu yang Digunakan oleh UUS Bank BTN

Berdasarkan dokumen Perjanjian Kerja Sama antara UUS Bank BTN dengan konsultan terkait dengan aktivitas dan kegiatan operasional pada UUS Bank BTN, sepanjang tahun 2023 UUS Bank BTN telah melakukan kerja sama dengan konsultan yaitu Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) untuk Jasa konsultan *Drafting/*Penyusunan Kebijakan Pembiayaan Konsumer.

Jumlah Penyimpangan (*Internal Fraud*) yang Terjadi dan Upaya Penyelesaian oleh UUS

Guna mengurangi penyimpangan internal (*internal fraud*) yang dilakukan oleh pengurus, pegawai tetap dan tidak tetap (*honorer* dan *outsourcing*) terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional UUS Bank BTN yang mempengaruhi kondisi kinerja UUS Bank BTN secara signifikan, UUS Bank BTN melakukan berbagai upaya pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya *internal fraud* yang dilakukan oleh pegawai.

Selama tahun 2023, penyimpangan/kecurangan terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional UUS dapat dijelaskan melalui tabel berikut:

Internal Fraud dalam 1 tahun	Jumlah Kasus yang Dilakukan oleh					
	Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun sebelumnya	Tahun berjalan	Tahun sebelumnya	Tahun berjalan	Tahun sebelumnya	Tahun berjalan
Total Fraud	-	-	2	1	-	-
Telah diselesaikan	-	-	2	1	-	-
Dalam proses penyelesaian di internal UUS	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-	-	-	-

Keterangan:

1. Jumlah kasus pada tahun berjalan adalah berdasarkan Laporan Hasil Audit Khusus periode Januari s.d Desember 2023.
2. Jumlah kasus yang "Telah diselesaikan" adalah kasus yang telah mendapatkan putusan sanksi dari Direksi s.d Desember 2023.
3. Jumlah kasus yang "Dalam proses penyelesaian di internal bank" adalah kasus yang belum mendapatkan putusan sanksi dari Direksi s.d Desember 2023.
4. Jumlah kasus yang "Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum" adalah kasus yang telah terdapat Keputusan Direksi berupa sanksi pidana (proses pelaporan pidana oleh Legal Division (LGD))

Jumlah Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian oleh UUS

Sepanjang tahun 2023, permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi UUS Bank BTN dan telah diajukan melalui proses hukum, sebagaimana tabel berikut:

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum tetap).	18	0
Dalam proses penyelesaian.	16	1
Total	34	1

Dalam penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi oleh UUS Bank BTN, selalu mengutamakan musyawarah ketika menghadapi sengketa dengan nasabah. Namun, apabila jalur musyawarah tidak dapat menyelesaikan sengketa tersebut, maka UUS Bank BTN dan nasabah menyepakati penyelesaian sengketa dengan menggunakan jalur arbitrase atau melalui lembaga peradilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan Prinsip Syariah.

Pendapatan non Halal dan Penggunaannya

Pendapatan non halal yang diperoleh antara lain berasal dari denda ataupun pendapatan bunga dari penempatan pada Bank BTN (Induk) yang digunakan sebagai dana likuiditas Kantor Cabang Syariah. Adapun total pendapatan yang diperoleh selama tahun 2023 (dalam satuan angka penuh Rupiah), adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	31 Desember 2023
1.	Sumber Dana Kebajikan Pada Awal Periode	122.592.227
2.	Penerimaan Dana Kebajikan	
	A. Infaq	-
	B. Sedekah	-
	C. Pengembalian dana kebajikan produktif	-
	D. Denda	447.035.877
	E. Penerimaan non halal	1.636.493
	Total Penerimaan	448.672.370

No.	Uraian	31 Desember 2023
3.	Penggunaan Dana Kebajikan	
	A. Dana Kebajikan Produktif	-
	B. Sumbangan	-
	C. Penggunaan lainnya untuk kepentingan umum	103.878.938
	Total Penggunaan	103.878.938
4.	Kenaikan (Penurunan) Sumber dana kebajikan atas Penggunaan	344.793.432
5.	Sumber Dana Kebajikan Pada Akhir Periode	467.385.659

Melakukan Self Assessment GCG UUS

Dalam rangka mewujudkan industri perbankan syariah yang sehat, *prudent* dan tangguh, Bank BTN sebagai entitas yang bergerak di bidang perbankan dimana melalui Unit Usaha Syariah wajib menerapkan tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance*) serta memenuhi Prinsip Syariah. Pelaksanaan GCG merupakan salah satu upaya untuk melindungi kepentingan *stakeholder* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku umum di industri perbankan syariah.

Implementasi GCG membutuhkan penilaian untuk melihat sejauh mana perkembangan terhadap prinsip-prinsip GCG yang telah dilaksanakan oleh Perseroan. Penilaian tersebut juga bermanfaat untuk memastikan adanya peningkatan kualitas penerapan GCG secara berkesinambungan ke dalam proses bisnis. UUS Bank BTN telah melaksanakan *self assessment* sesuai dengan ketentuan BI/OJK yang mengharuskan Perseroan melakukan penilaian sendiri (*internal self assessment*) terhadap pelaksanaan GCG.

Hasil *self assessment* UUS Bank BTN untuk periode Januari sampai dengan Desember tahun 2023, dapat disampaikan sebagai berikut:

No.	Faktor	Bobot (%)	Peringkat	Nilai
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur yang membidangi UUS	0.35	1.00	0.35
2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah	0.20	1.00	0.20
3	Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa	0.10	2.00	0.20
4	Penyaluran dana kepada nasabah pembiayaan inti dan penyimpanan dana oleh deposito inti	0.10	2.00	0.20
5	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan GCG dan Pelaporan Internal	0.25	2.00	0.50
Total Nilai Komposit		1.00		1.75
Kriteria Angka			2	
Predikat			BAIK	

Berdasarkan hasil *Self Assessment*, nilai komposit Unit Usaha Syariah Bank BTN sebesar 1,75 dengan kriteria angka 2 dan predikat "Baik", nilai komposit tersebut sama dari nilai komposit tahun sebelumnya. Hal tersebut telah mencerminkan manajemen Perseroan telah melakukan penerapan GCG yang secara umum cukup baik dan konsisten. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip GCG. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip GCG, maka secara umum kelemahan tersebut dapat diselesaikan dengan baik oleh manajemen Perseroan.

Pelaksanaan Kepatuhan Terhadap Prinsip Syariah

Berdasarkan POJK Nomor 46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, Perseroan melalui Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan berkoordinasi dengan Dewan Pengawas Syariah terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan terhadap Prinsip Syariah. Pada tahun 2023, telah dilaksanakan rapat koordinasi antara Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan, Direktur UUS dengan Dewan Pengawas Syariah sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal 1 September 2023 guna memastikan pelaksanaan

fungsi pengawasan kepatuhan terhadap prinsip syariah di Unit Usaha Syariah (UUS) Bank BTN baik di Kantor Pusat dan Kantor Cabang telah dijalankan dengan baik oleh Dewan Pengawas Syariah. Secara keseluruhan, pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Pengawas Syariah Perseroan terhadap proses pengembangan produk baru dan pengawasan terhadap kegiatan Bank telah dilaporkan melalui Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah per 6 (enam) bulan, yang berakhir pada bulan Juni dan Desember.

PELAPORAN RISK MANAGEMENT UNIT USAHA SYARIAH

Pada periode tahun 2023 UUS telah menyampaikan Laporan Profil Risiko Triwulanan kepada OJK sesuai dengan ketentuan, yaitu sebagai berikut:

1. 128/DIR/ERMD-SHAD/I/2023 Penyampaian Laporan Profil Risiko Unit Usaha Syariah BTN Triwulan IV/2022.
2. 444/DIR/ERMD/IV/2023 Penyampaian Laporan Profil Risiko Unit Usaha Syariah BTN Triwulan I/2023.
3. 645/DIR/ERMD/VII/2023 Penyampaian Laporan Profil Risiko Unit Usaha Syariah BTN Triwulan II/2023.
4. 892/S/DIR/ERMD/X/2023 Penyampaian Laporan Profil Risiko UUS Bank BTN Periode Triwulan III/2023.
5. 71/S/DIR/ERMD/I/2024 Penyampaian Laporan Profil Risiko UUS Bank BTN Periode Triwulan IV/2023.

Pada Unit Usaha Syariah laporan untuk *risk management* tidak berbeda dengan Bank Umum Konvensional namun ditambahkan 2 (dua) jenis risiko yaitu:

a. Pengelolaan Risiko Imbal Hasil

Pegawai *Sharia Banking Division* (SHAD) termasuk manajemen unit bisnis Perseroan menjadi bagian dari pelaksana Manajemen Risiko untuk Risiko Imbal Hasil, mengingat Imbal Hasil merupakan hasil dari seluruh aktivitas bisnis Unit Usaha Syariah (UUS). Peran Manajemen Unit Bisnis dalam hal ini *Treasury Department* Unit Usaha Syariah (UUS) adalah mengidentifikasi Risiko Imbal Hasil atas Risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan Perseroan kepada nasabah, karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima Perseroan dari penyaluran dana, yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga Perseroan. Pengukuran Risiko Imbal Hasil berdasarkan

pada hasil *assessment* dengan menggunakan parameter/indikator yaitu komposisi dana pihak ketiga, strategi dan kinerja bank dalam menghasilkan laba/pendapatan serta perilaku nasabah dana pihak ketiga. Dari ketiga indikator ini yang digunakan *Treasury Department* Unit Usaha Syariah (UUS) dalam mengelola Risiko Imbal Hasil. Dalam rangka pemantauan Risiko Imbal Hasil dan memastikan terjaganya Imbal hasil yang diberikan kepada nasabah maka *Sharia Banking Division* (SHAD) dalam hal ini *Treasury Department* melakukan pengelolaan kebijakan terkait spesial margin Bagi Hasil Pembiayaan dengan berkoordinasi dengan unit bisnis dalam hal ini *Commercial Financing Department* dan Kantor Cabang Syariah.

b. Pengelolaan Risiko Investasi

Risiko Investasi adalah Risiko akibat Perseroan ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil baik yang menggunakan metode *net revenue sharing* maupun yang menggunakan metode *profit and loss sharing*. Pengelolaan Risiko Investasi merupakan pengelolaan atas risiko pembiayaan yang diberikan dengan basis Bagi Hasil yang merupakan bagian dari Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko Bank untuk Unit Usaha Syariah (UUS) Perseroan serta disusun sebagai bagian dari proses penilaian risiko. Eksposur Risiko Investasi dipantau sejak proses pemberian Pembiayaan sampai dengan jatuh tempo Pembiayaan. Pengukuran Risiko Investasi menggunakan parameter/indikator yang terdiri dari komposisi dan tingkat konsentrasi pembiayaan berbasis bagi hasil, kualitas pembiayaan berbasis bagi hasil dan faktor eksternal. Ketiga indikator ini yang digunakan *Commercial Financing Department* pada Unit Usaha Syariah (UUS) dalam mengelola atas Risiko Investasi. Pemantauan dan pengendalian risiko investasi di antaranya dengan mengevaluasi eksposur risiko pembiayaan yang berbasis bagi hasil terhadap limit risiko investasi serta melakukan *review* kebijakan *Internal Credit Rating* antara *Commercial Financing Department* pada Unit Usaha Syariah (UUS) bersama dengan *Wholesale Credit Risk Division* (WRD). Untuk Pengelolaan pembiayaan berbasis bagi hasil dilakukan oleh *Commercial Financing Department* pada Unit Usaha Syariah (UUS) dan Kantor Cabang Syariah.

Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka —

Perseroan senantiasa patuh dalam mengimplementasikan GCG sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk mengacu pada Pedoman tata kelola perusahaan terbuka yang diatur dalam Peraturan OJK Nomor 21/POJK.04/2015 dan Surat Edaran OJK Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka. POJK tersebut mengatur 5 (lima) aspek, 8 (delapan) prinsip, serta 25 (dua puluh lima) rekomendasi penerapan aspek dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Hingga akhir tahun 2023, Perseroan telah menerapkan seluruh rekomendasi dalam peraturan tersebut dengan rincian informasi sebagai berikut:

No	Aspek; Prinsip; Rekomendasi	Comply or Explain
A. Aspek 1 : Hubungan Perusahaan Terbuka Dengan Pemegang Saham Dalam Menjamin Hak-Hak Pemegang Saham.		
A.1. Prinsip 1 : Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).		
	A.1.1. Rekomendasi 1 : Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (<i>voting</i>) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi, dan kepentingan pemegang saham. Penjelasan : Setiap saham dengan hak suara yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara (<i>one share one vote</i>). Pemegang saham dapat menggunakan hak suaranya pada saat pengambilan keputusan, terutama dalam pengambilan keputusan dengan cara pengumpulan suara (<i>voting</i>). Namun demikian, mekanisme pengambilan keputusan dengan cara pengumpulan suara (<i>voting</i>) baik secara terbuka maupun tertutup belum diatur secara rinci. Perusahaan Terbuka direkomendasikan mempunyai prosedur pengambilan suara dalam pengambilan keputusan atas suatu mata acara RUPS. Adapun prosedur pengambilan suara (<i>voting</i>) tersebut harus menjaga independensi ataupun kebebasan pemegang saham. Sebagai contoh, dalam pengumpulan suara (<i>voting</i>) secara terbuka dilakukan dengan cara mengangkat tangan sesuai dengan instruksi pilihan yang ditawarkan oleh pimpinan RUPS. Sedangkan, dalam pengumpulan suara (<i>voting</i>) secara tertutup dilakukan pada keputusan yang membutuhkan kerahasiaan ataupun atas permintaan pemegang saham, dengan cara menggunakan kartu suara ataupun dengan penggunaan <i>electronic voting</i>.	a. Prosedur pengambilan suara dalam pengambilan keputusan atas suatu mata acara RUPS dilakukan dengan pengumpulan suara (<i>voting</i>) secara tertutup sebagaimana tertuang dalam Tata Tertib RUPS yang diungkapkan kepada publik melalui situs <i>website</i> Perseroan. b. Prosedur pengambilan suara tersebut sudah menjaga independensi ataupun kebebasan pemegang saham. Pada tahun 2023, Perseroan telah menyelenggarakan RUPS Tahunan pada tanggal 16 Maret 2023. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara (<i>voting</i>). Keputusan diambil jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam rapat. Pemungutan suara dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut: a. Pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara abstain atau yang tidak setuju akan diminta mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas. b. Petugas Rapat akan mengumpulkan kartu suara dari pemegang saham atau kuasanya kemudian menyerahkan kartu suara kepada Notaris untuk dihitung. c. Jumlah suara yang abstain dan tidak setuju diperhitungkan dengan suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat dan selisihnya merupakan jumlah suara yang setuju. d. Pemegang saham dengan hak suara yang sah namun tidak mengeluarkan suara (<i>abstain</i>) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. e. Notaris akan menghitung dan menyampaikan hasil pemungutan suara atas usulan keputusan Rapat yang diajukan. Comply
	A.1.2. Rekomendasi 2 : Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan. Penjelasan : Kehadiran seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka bertujuan agar setiap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dapat memperhatikan, menjelaskan, dan menjawab secara langsung permasalahan yang terjadi atau pertanyaan yang diajukan oleh pemegang saham terkait mata acara dalam RUPS.	Dalam penyelenggaraan RUPS, Perseroan senantiasa mematuhi semua ketentuan yang berlaku. Pada periode pelaksanaan RUPS Tahunan pada tanggal 16 Maret 2023, seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris termasuk anggota Komite Audit dapat hadir mengikuti RUPS Tahunan. Comply

No	Aspek; Prinsip; Rekomendasi	Comply or Explain
	A.1.3. Rekomendasi 3 : Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam Situs Web Perusahaan Terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun. Penjelasan : Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Perusahaan Terbuka wajib membuat ringkasan risalah RUPS dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing (minimal dalam bahasa Inggris), serta diumumkan 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan kepada masyarakat, yang salah satunya melalui Situs Web Perusahaan Terbuka. Ketersediaan ringkasan risalah RUPS pada Situs Web Perusahaan Terbuka memberikan kesempatan bagi pemegang saham yang tidak hadir untuk mendapatkan informasi penting dalam penyelenggaraan RUPS secara mudah dan cepat. Oleh karena itu, ketentuan tentang jangka waktu minimal ketersediaan ringkasan risalah RUPS di Situs Web dimaksudkan untuk menyediakan kecukupan waktu bagi pemegang saham untuk memperoleh informasi tersebut.	Perseroan menyediakan ringkasan risalah RUPS dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris melalui situs <i>website</i> Perseroan www.btn.co.id pada menu Hubungan Investor (<i>Investor Relation</i>), maupun di media cetak serta melalui sistem pelaporan elektronik IDXnet dan OJK <i>E-reporting</i>, yakni pada tanggal 17 Maret 2023 untuk RUPS Tahunan Tahun Buku 2022. Comply
A.2. Prinsip 2 : Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor.		
	A.2.1. Rekomendasi 4 : Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor. Penjelasan : Adanya komunikasi antara Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dimaksudkan agar para pemegang saham atau investor mendapatkan pemahaman lebih jelas atas informasi yang telah dipublikasikan kepada masyarakat, seperti laporan berkala, keterbukaan informasi, kondisi atau prospek bisnis dan kinerja, serta pelaksanaan tata kelola Perusahaan Terbuka. Disamping itu, pemegang saham atau investor juga dapat menyampaikan masukan dan opini kepada manajemen Perusahaan Terbuka. Kebijakan komunikasi dengan para pemegang saham atau investor menunjukkan komitmen Perusahaan Terbuka dalam melaksanakan komunikasi dengan para pemegang saham atau investor. Dalam kebijakan tersebut dapat mencakup strategi, program, dan waktu pelaksanaan komunikasi, serta panduan yang mendukung pemegang saham atau investor untuk berpartisipasi dalam komunikasi tersebut.	Perseroan telah memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor mengacu pada Kebijakan Hubungan Investor yang mencakup <i>analyst meeting</i>, <i>public expose</i>, <i>investor meeting</i>, Laporan Tahunan dan sebagainya. Petunjuk Teknis Nomor PT.9-AD.9 tanggal 18 September 2023 tentang Pengelolaan Komunikasi Bank PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Comply
	A.2.2. Rekomendasi 5 : Perusahaan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam Situs Web. Penjelasan : Pengungkapan kebijakan komunikasi merupakan bentuk transparansi atas komitmen Perusahaan Terbuka dalam memberikan kesetaraan kepada semua pemegang saham atau investor atas pelaksanaan komunikasi. Pengungkapan informasi tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dan peran pemegang saham atau investor dalam pelaksanaan program komunikasi Perusahaan Terbuka.	Perseroan telah mengungkapkan kebijakan komunikasi dengan para pemegang saham atau investor pada situs <i>website</i> Perseroan (www.btn.co.id) menu Hubungan Investor - Pedoman Kebijakan Hubungan Investor. Comply

No	Aspek; Prinsip; Rekomendasi		Comply or Explain
B. Aspek 2 : Fungsi dan Peran Dewan Komisaris			
B.1. Prinsip 3 : Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris.			
	B.1.1.	Rekomendasi 6 : Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka. Penjelasan : Jumlah anggota Dewan Komisaris dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas dari Dewan Komisaris. Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka wajib mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang paling kurang terdiri dari 2 orang berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Selain itu, perlu juga mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka yang antara lain yang meliputi karakteristik, kapasitas, dan ukuran, serta pencapaian tujuan dan pemenuhan kebutuhan bisnis yang berbeda diantara Perusahaan Terbuka. Namun demikian, jumlah anggota Dewan Komisaris yang terlalu besar berpotensi dapat mengganggu efektivitas pelaksanaan fungsi Dewan Komisaris.	Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris telah mempertimbangkan kondisi Perseroan antara lain karakteristik, kapasitas, dan ukuran, serta pencapaian tujuan dan pemenuhan kebutuhan bisnis bank mengacu pada ketentuan Regulator. Jumlah anggota Dewan Komisaris saat ini dipandang cukup dan sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik atau sama dengan jumlah anggota Direksi. Comply
	B.1.2.	Rekomendasi 7 : Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan. Penjelasan : Komposisi Dewan Komisaris merupakan kombinasi karakteristik baik dari segi organ Dewan Komisaris maupun anggota Dewan Komisaris secara individu, sesuai dengan kebutuhan Perusahaan Terbuka. Karakteristik tersebut dapat tercermin dalam penentuan keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka. Komposisi yang telah memperhatikan kebutuhan Perusahaan Terbuka merupakan suatu hal yang positif, khususnya terkait pengambilan keputusan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang lebih luas.	Komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan sebagaimana yang telah diungkapkan pada bagian Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris pada Laporan Tahunan ini. Comply
B.2. Prinsip 4 : Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris.			
	B.2.1.	Rekomendasi 8 : Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris. Penjelasan : Kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) Dewan Komisaris merupakan suatu pedoman yang digunakan sebagai bentuk akuntabilitas atas penilaian kinerja Dewan Komisaris secara kolegal. <i>Self assessment</i> atau penilaian sendiri dimaksud dilakukan oleh masing-masing anggota untuk menilai pelaksanaan kinerja Dewan Komisaris secara kolegal, dan bukan menilai kinerja individual masing-masing anggota Dewan Komisaris. Dengan adanya <i>self assessment</i> ini diharapkan masing-masing anggota Dewan Komisaris dapat berkontribusi untuk memperbaiki kinerja Dewan Komisaris secara berkesinambungan. Dalam kebijakan tesebut dapat mencakup kegiatan penilaian yang dilakukan beserta maksud dan tujuannya, waktu pelaksanaannya secara berkala, dan tolok ukur atau kriteria penilaian yang digunakan sesuai dengan dengan rekomendasi yang diberikan oleh fungsi nominasi dan remunerasi Perusahaan Terbuka, dimana adanya fungsi tersebut telah diwajibkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.	Dewan Komisaris telah memiliki kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) yang tercantum dalam Surat Keputusan Bersama tentang Tata Hubungan Kerja Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dalam Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris No.01/DEKOM-BTN/2021 dan Direksi No.01/ DIR-BTN/2021, Bab IV Evaluasi Kinerja yang diuraikan pada bagian penilaian kinerja Dewan Komisaris pada Laporan Tahunan ini serta situs web Perseroan (www.btn.co.id) menu Investor Relation – GCG – Crossreference ASEAN CG Scorecard – SKB. Comply

No	Aspek; Prinsip; Rekomendasi	Comply or Explain
	B.2.2. Rekomendasi 9 : Kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka. Penjelasan : Pengungkapan kebijakan <i>self assessment</i> atas kinerja Dewan Komisaris dilakukan tidak hanya untuk memenuhi aspek transparansi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, namun juga untuk memberikan keyakinan khususnya kepada para pemegang saham atau investor atas upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam meningkatkan kinerja Dewan Komisaris. Dengan adanya pengungkapan tersebut pemegang saham atau investor mengetahui mekanisme <i>check and balance</i> terhadap kinerja Dewan Komisaris.	Kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris diungkapkan pada bagian penilaian kinerja Dewan Komisaris pada Laporan Tahunan ini. Comply
	B.2.3. Rekomendasi 10: Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan. Penjelasan : Kebijakan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan kebijakan yang dapat meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap Perusahaan Terbuka, sehingga integritas perusahaan akan tetap terjaga. Kebijakan ini diperlukan untuk membantu kelancaran proses hukum dan agar proses hukum tersebut tidak mengganggu jalannya kegiatan usaha. Selain itu, dari sisi moralitas, kebijakan ini membangun budaya beretika di lingkungan Perusahaan Terbuka. Kebijakan tersebut dapat tercakup dalam Pedoman ataupun Kode Etik yang berlaku bagi Dewan Komisaris. Selanjutnya, yang dimaksud dengan terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan adanya status terpidana terhadap anggota Dewan Komisaris dari pihak yang berwenang. Kejahatan keuangan dimaksud seperti manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan serta Tindakan Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.	Perseroan telah memiliki kebijakan pada Pedoman dan Tata tertib Kerja Dewan Komisaris Nomor 05/KOM/ BTN/2023 tanggal tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk terkait pengunduran dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau Negara dan apabila yang bersangkutan dinyatakan bersalah oleh putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Comply
	B.2.4. Rekomendasi 11: Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi. Penjelasan : Berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, komite yang menjalankan fungsi nominasi mempunyai tugas untuk menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon anggota Direksi. Salah satu kebijakan yang dapat mendukung proses Nominasi sebagaimana dimaksud adalah kebijakan suksesi anggota Direksi. Kebijakan mengenai suksesi bertujuan untuk menjaga kesinambungan proses regenerasi atau kaderisasi kepemimpinan di perusahaan dalam rangka mempertahankan keberlanjutan bisnis dan tujuan jangka panjang perusahaan.	Pengangkatan dan pemberhentian Direksi Perseroan dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip profesionalisme dan GCG. Perseroan merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), oleh karena itu kebijakan suksesi Direksi di antaranya mengacu kepada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-11/MBU/07/2021 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara. Selain itu, sebagai perusahaan terbuka, kebijakan Perseroan juga mengacu kepada peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Uraian tentang kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi Perseroan telah diungkapkan pada bagian Kebijakan Suksesi Direksi Laporan Tahunan ini. Comply

No	Aspek; Prinsip; Rekomendasi	Comply or Explain
C. Aspek 3 : Fungsi dan Peran Direksi		
C.1. Prinsip 5 : Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi.		
	C.1.1. Rekomendasi 12: Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka serta efektivitas dalam pengambilan keputusan. Penjelasan : Sebagai organ perusahaan yang berwenang dalam pengurusan perusahaan, penentuan jumlah Direksi sangat mempengaruhi jalannya kinerja Perusahaan Terbuka. Dengan demikian, penentuan jumlah anggota Direksi harus dilakukan melalui pertimbangan yang matang dan wajib mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dimana berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang. Disamping itu, dalam penentuan jumlah Direksi harus didasarkan pada kebutuhan untuk mencapai maksud dan tujuan Perusahaan Terbuka dan disesuaikan dengan kondisi Perusahaan Terbuka yang meliputi karakteristik, kapasitas, dan ukuran Perusahaan Terbuka serta bagaimana tercapainya efektivitas pengambilan keputusan Direksi.	Penentuan jumlah anggota Direksi telah mempertimbangkan kondisi Perseroan antara lain karakteristik, kapasitas, dan ukuran, serta pencapaian tujuan dan pemenuhan kebutuhan bisnis bank mengacu ketentuan Regulator. Jumlah anggota Direksi telah memenuhi ketentuan Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Comply
	C.1.2. Rekomendasi 13: Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan, keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan. Penjelasan : Seperti halnya Dewan Komisaris, keberagaman komposisi anggota Direksi merupakan kombinasi karakteristik yang diinginkan baik dari segi organ Direksi maupun anggota Direksi secara individu, sesuai dengan kebutuhan Perusahaan Terbuka. Kombinasi tersebut ditentukan dengan cara memperhatikan keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang sesuai pada pembagian tugas dan fungsi jabatan Direksi dalam mencapai tujuan Perusahaan Terbuka. Dengan demikian, pertimbangan kombinasi karakteristik dimaksud akan berdampak dalam ketepatan proses pencalonan dan penunjukan individual anggota Direksi ataupun Direksi secara kolektif.	Komposisi anggota Direksi memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan sebagaimana yang telah diungkapkan pada bagian Keberagaman Komposisi Direksi pada Laporan Tahunan ini. Comply
	C.1.3. Rekomendasi 14: Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi. Penjelasan : Laporan Keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban manajemen atas pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh Perusahaan Terbuka, yang wajib disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum di Indonesia dan juga peraturan OJK terkait, antara lain peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai penyajian dan pengungkapan Laporan Keuangan Perusahaan Terbuka. Berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai tanggung jawab Direksi atas Laporan Keuangan, Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas Laporan Keuangan, yang ditandatangani Direktur Utama dan anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan.	Pada periode 2023, Direktur yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja di bidang keuangan dengan informasi sebagai berikut: a. Pendidikan 1. Sarjana Ekonomi 2. Magister Ekonomi 3. Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan b. Pengalaman Kerja 1. Maret 2021 – saat ini menjabat sebagai Direktur Finance 2. 2015-2021 menjabat sebagai Head of Treasury Division. 3. 2015 menjabat sebagai Plt Kepala Wilayah, Kantor Wilayah I 4. 2014 menjabat sebagai Head of Treasury Division. 5. 2013 menjabat sebagai Head of Institutional Banking Division. 6. 2012 menjabat sebagai Post Office Alliance Desk Head Adapun sertifikasi yang dimiliki oleh Direktur yang membawahi bidang keuangan/ akuntansi dapat dilihat pada bagian Pengembangan Kompetensi Direksi Laporan Tahunan ini. Comply

No	Aspek; Prinsip; Rekomendasi	Comply or Explain
	Dengan demikian, pengungkapan dan penyusunan informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan akan sangat tergantung pada keahlian, dan/atau pengetahuan Direksi, khususnya anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan. Adanya kualifikasi keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi yang setidaknya dimiliki anggota Direksi dimaksud dapat memberikan keyakinan atas penyusunan Laporan Keuangan, sehingga Laporan Keuangan tersebut dapat diandalkan oleh para pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi terkait Perusahaan Terbuka dimaksud. Keahlian dan/atau pengetahuan tersebut dapat dibuktikan dengan latar belakang pendidikan, sertifikasi pelatihan, dan/atau pengalaman kerja terkait	
C.2. Prinsip 6 : Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi.		
	C.2.1. Rekomendasi 15: Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi. Penjelasan : Seperti halnya pada Dewan Komisaris, kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) Direksi merupakan suatu pedoman yang digunakan sebagai bentuk akuntabilitas atas penilaian kinerja Direksi secara kolektif. <i>Self assessment</i> atau penilaian sendiri dimaksud dilakukan oleh masing-masing anggota Direksi untuk menilai pelaksanaan kinerja Direksi secara kolektif, dan bukan menilai kinerja individual masing-masing anggota Direksi. Dengan adanya <i>self assessment</i> ini diharapkan masing-masing anggota Direksi dapat berkontribusi untuk memperbaiki kinerja Direksi secara berkesinambungan. Dalam kebijakan tersebut dapat mencakup kegiatan penilaian yang dilakukan beserta maksud dan tujuannya, waktu pelaksanaannya secara berkala, dan tolak ukur atau kriteria penilaian yang digunakan sesuai dengan dengan rekomendasi yang diberikan oleh fungsi nominasi dan remunerasi Perusahaan Terbuka, dimana pembentukan fungsi tersebut telah diwajibkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.	Direksi telah memiliki kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) yang tercantum dalam Surat Keputusan Bersama tentang Tata Hubungan Kerja Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tahun 2021 Bab IV Evaluasi Kinerja serta sistem penilaian ini dirangkum sebagai <i>Key Performance Indicator</i> (KPI) sebagaimana yang diuraikan pada bagian penilaian kinerja Direksi Laporan Tahunan ini serta situs web Perseroan (www.btn.co.id) menu Investor Relation-GCG - Crossreference ASEAN CG Scorecard. Comply
	C.2.2. Rekomendasi 16: Kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui laporan tahunan Perusahaan Terbuka. Penjelasan : Pengungkapan kebijakan <i>self assessment</i> atas kinerja Direksi dilakukan tidak hanya untuk memenuhi aspek transparansi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, namun juga untuk memberikan informasi penting atas upaya-upaya perbaikan dalam pengelolaan Perusahaan Terbuka. Informasi tersebut sangat bermanfaat untuk memberikan keyakinan kepada pemegang saham atau investor bahwa terdapat kepastian pengelolaan perusahaan terus dilakukan ke arah yang lebih baik. Dengan adanya pengungkapan tersebut pemegang saham atau investor mengetahui mekanisme <i>check and balance</i> terhadap kinerja Direksi.	Kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan pada bagian penilaian kinerja Direksi pada Laporan Tahunan ini. Comply

No	Aspek; Prinsip; Rekomendasi		Comply or Explain
	C.2.3.	Rekomendasi 17: Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan. Penjelasan : Kebijakan pengunduran diri anggota Direksi yang terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan kebijakan yang dapat meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap Perusahaan Terbuka, sehingga integritas perusahaan akan tetap terjaga. Kebijakan ini diperlukan untuk membantu kelancaran proses hukum dan agar proses hukum tersebut tidak mengganggu jalannya kegiatan usaha. Selain itu, dari sisi moralitas, kebijakan ini akan membangun budaya beretika di lingkungan Perusahaan Terbuka. Kebijakan tersebut dapat tercakup dalam Pedoman ataupun Kode Etik yang berlaku bagi Direksi. Selanjutnya, yang dimaksud dengan terlibat dalam kejahatan keuangan merupakan adanya status terpidana terhadap anggota Direksi dari pihak yang berwenang. Kejahatan keuangan dimaksud seperti manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan serta Tindakan Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.	Perseroan telah memiliki kebijakan pada Pedoman dan Tata tertib Kerja Direksi melalui Kebijakan Khusus Nomor KK.6-G tanggal 12 September 2023 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi. terkait pengunduran dan pemberhentian anggota Direksi apabila terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau Negara dan apabila yang bersangkutan dinyatakan bersalah oleh putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Comply
D. Aspek 4 : Partisipasi Pemangku Kepentingan			
D.1. Prinsip 7 : Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan.			
	D.1.1.	Rekomendasi 18: Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya insider trading. Penjelasan : Seseorang yang mempunyai informasi orang dalam dilarang melakukan suatu transaksi Efek dengan menggunakan informasi orang dalam sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Pasar Modal. Perusahaan Terbuka dapat meminimalisir terjadinya <i>insider trading</i> tersebut melalui kebijakan pencegahan, misalnya dengan memisahkan secara tegas data dan/ atau informasi yang bersifat rahasia dengan yang bersifat publik, serta membagi tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan informasi dimaksud secara proporsional dan efisien.	Perseroan telah memiliki kebijakan mencegah terjadinya <i>insider trading</i> sebagaimana yang diatur dalam Kebijakan Khusus Nomor KK.9-AA tanggal 15 September 2023 tentang Aktivitas Hubungan Investor sebagaimana yang dapat dilihat di situs web Perseroan (www.btn.co.id) menu Hubungan Investor - Pedoman Kebijakan Hubungan Investor. Comply
	D.1.2.	Rekomendasi 19: Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan anti korupsi dan anti <i>fraud</i>. Penjelasan : Kebijakan anti korupsi bermanfaat untuk memastikan agar kegiatan usaha Perusahaan Terbuka dilakukan secara legal, <i>prudent</i>, dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Kebijakan tersebut dapat merupakan bagian dalam kode etik, ataupun dalam bentuk tersendiri. Dalam kebijakan tersebut dapat meliputi antara lain mengenai program dan prosedur yang dilakukan dalam mengatasi praktik korupsi, balas jasa (<i>kickbacks</i>), <i>fraud</i>, suap dan/atau gratifikasi dalam Perusahaan Terbuka. Lingkup dari kebijakan tersebut harus menggambarkan pencegahan Perusahaan Terbuka terhadap segala praktik korupsi baik memberi atau menerima dari pihak lain.	Pelaksanaan penerapan anti <i>fraud</i> di Bank BTN diatur dengan Surat Edaran Direksi No. 03/PD/DIR/PPBD/2020 tanggal 31 Maret 2020 Pedoman Kebijakan Strategi Anti Fraud. Sebagai pedoman dalam implementasi Pengendalian Gratifikasi sebagai inisiatif dari program anti korupsi secara nasional, Perseroan menerbitkan petunjuk pelaksanaan pedoman pengendalian gratifikasi dalam suatu Kebijakan Khusus Nomor KK.6-A tanggal 25 April 2022 tentang Prosedur Pengendalian Gratifikasi. Comply
	D.1.3.	Rekomendasi 20: Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor. Penjelasan : Kebijakan tentang seleksi pemasok atau vendor bermanfaat untuk memastikan agar Perusahaan Terbuka memperoleh barang atau jasa yang diperlukan dengan harga yang kompetitif dan kualitas yang baik. Sedangkan kebijakan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor bermanfaat untuk memastikan bahwa rantai pasokan (<i>supply chain</i>) berjalan dengan efisien dan efektif. Kemampuan pemasok atau	Perseroan telah memiliki kebijakan terkait pengelolaan vendor sebagaimana yang diatur dalam Kebijakan Khusus Nomor KK.9-H tanggal 30 Juni 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa dan Petunjuk Teknis Nomor PT.9-H.1 tanggal 29 September 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang dan atau Jasa. Secara garis besar, cakupan kebijakan ini antara lain meliputi kriteria dalam seleksi vendor, mekanisme pengadaan yang transparan, evaluasi kinerja vendor, rekam jejak vendor.

No	Aspek; Prinsip; Rekomendasi	Comply or Explain
	vendor dalam memasok/memenuhi barang atau jasa yang dibutuhkan perusahaan akan mempengaruhi kualitas output perusahaan. Dengan demikian, pelaksanaan kebijakan-kebijakan tersebut dapat menjamin kontinuitas pasokan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas yang dibutuhkan Perusahaan Terbuka. Adapun cakupan kebijakan ini meliputi kriteria dalam pemilihan pemasok atau vendor, mekanisme pengadaan yang transparan, upaya peningkatan kemampuan pemasok atau vendor, dan pemenuhan hak-hak yang berkaitan dengan pemasok atau vendor. Perseroan memiliki kebijakan terkait pengadaan barang dan jasa yang berisi tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor yang tertuang dalam standar Pedoman <i>Procurement</i>.	Peningkatan kemampuan pemasok atau vendor dilakukan dengan melakukan pembinaan kepada vendor melalui rapat koordinasi, <i>monitoring</i> dan evaluasi kinerja vendor. Pelaksanaan kebijakan seleksi vendor dilakukan dengan pengelolaan Daftar Rekanan Bank yang dapat digunakan sebagai <i>database</i> vendor dalam pengadaan dengan metode penunjukan langsung/ pemilihan langsung/seleksi langsung. Peraturan Direksi dan Surat Edaran tersebut di atas juga mengatur <i>Standar Operating Procedure</i> (SOP) mekanisme pengadaan yang transparan melalui metode lelang/pemilihan langsung/seleksi langsung/penunjukan langsung serta ketentuan tentang kontrak kerja dengan vendor. Sehingga dengan penerapan kebijakan tersebut diharapkan kontinuitas pasokan yang dibutuhkan perusahaan dapat terjamin. Comply
D.1.4.	Rekomendasi 21: Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur. Penjelasan : Kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur digunakan sebagai pedoman dalam melakukan pinjaman kepada kreditur. Tujuan dari kebijakan dimaksud adalah untuk menjaga terpenuhinya hak-hak dan menjaga kepercayaan kreditur terhadap Perusahaan Terbuka. Dalam kebijakan tersebut mencakup pertimbangan dalam melakukan perjanjian, serta tindak lanjut dalam pemenuhan kewajiban Perusahaan Terbuka kepada kreditur.	Kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur digunakan sebagai pedoman dalam melakukan pinjaman kepada kreditur. Tujuan dari kebijakan dimaksud adalah untuk menjaga terpenuhinya hak-hak dan menjaga kepercayaan kreditur terhadap Perusahaan Terbuka. Dalam kebijakan tersebut mencakup pertimbangan dalam melakukan perjanjian, serta tindak lanjut dalam pemenuhan kewajiban Perusahaan Terbuka kepada kreditur. Kebijakan hak-hak dasar kreditur, antara lain adalah: - Menerima pelunasan pokok dan pembayaran bunga pada waktu yang disepakati. - Memperoleh hak atas denda keterlambatan pelunasan pokok dan pembayaran bunga. - Meminta keterangan, informasi, dan dokumen serta memeriksa pembukuan Perseroan. Untuk tahun 2023, terdapat 2 kreditur Perseroan yaitu: Kreditur Pinjaman Bilateral dan Kreditur Obligasi. Comply
D.1.5.	Rekomendasi 22: Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan sistem <i>whistleblowing</i>. Penjelasan : Kebijakan sistem <i>whistleblowing</i> yang telah disusun dengan baik akan memberikan kepastian perlindungan kepada saksi atau pelapor atas suatu indikasi pelanggaran yang dilakukan karyawan atau manajemen Perusahaan Terbuka. Penerapan kebijakan sistem tersebut akan berdampak pada pembentukan budaya tata kelola perusahaan yang baik. Kebijakan sistem <i>whistleblowing</i> mencakup antara lain jenis pelanggaran yang dapat dilaporkan melalui sistem <i>whistleblowing</i>, cara pengaduan, perlindungan dan jaminan kerahasiaan pelapor, penanganan pengaduan, pihak yang mengelola aduan, dan hasil penanganan dan tindak lanjut pengaduan.	Perseroan telah memiliki kebijakan pelaksanaan <i>Whistleblowing System</i> yang diatur dalam Petunjuk Teknis Nomor PT.7-B.2 tanggal 31 Oktober 2023 tentang Pengelolaan <i>Whistleblowing System</i> Bank BTN yang telah mencakup jenis pelanggaran yang dapat dilaporkan melalui sistem <i>whistleblowing</i>, cara pengaduan, perlindungan dan jaminan kerahasiaan pelapor, penanganan pengaduan, pihak yang mengelola aduan, dan hasil penanganan dan tindak lanjut pengaduan sesuai ketentuan OJK. Pengungkapan atas kebijakan <i>Whistleblowing System</i> dimaksud pada periode 2023 diuraikan pada bagian <i>Whistleblowing System</i> Laporan Tahunan ini. Comply
D.1.6.	Rekomendasi 23: Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan. Penjelasan : Insentif jangka panjang merupakan insentif yang didasarkan atas pencapaian kinerja jangka panjang. Rencana insentif jangka panjang mempunyai dasar pemikiran bahwa kinerja jangka panjang perusahaan tercermin oleh pertumbuhan nilai dari saham atau target-target jangka panjang perusahaan lainnya. Insentif jangka panjang bermanfaat dalam rangka menjaga loyalitas dan memberikan motivasi kepada Direksi dan karyawan untuk meningkatkan kinerja atau produktivitasnya yang akan berdampak pada peningkatan kinerja perusahaan dalam jangka panjang.	Insentif jangka panjang untuk Direksi dan Dewan Komisaris telah diatur diantaranya: - Peraturan Direksi No.2/PD/DIR/PPDB/2021 tanggal perihal perubahan atas Peraturan Direksi No.02/PD/HCD/2017 tentang Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris; - Kebijakan Khusus Nomor No.3-B tanggal 31 Oktober 2023 tentang Remunerasi. Pemberian remunerasi dan insentif telah diungkapkan pada bagian Penerapan Tata Kelola Pemberian Remunerasi Bank BTN pada Laporan Tahunan ini.

No	Aspek; Prinsip; Rekomendasi	Comply or Explain
	Adanya suatu kebijakan insentif jangka panjang merupakan komitmen nyata Perusahaan Terbuka untuk mendorong pelaksanaan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan Karyawan dengan syarat, prosedur dan bentuk yang disesuaikan dengan tujuan jangka panjang Perusahaan Terbuka. Kebijakan dimaksud dapat mencakup antara lain maksud dan tujuan pemberian insentif jangka panjang, syarat dan prosedur dalam pemberian insentif, dan kondisi dan risiko yang harus diperhatikan oleh Perusahaan Terbuka dalam pemberian insentif. Kebijakan tersebut juga dapat tercakup dalam kebijakan remunerasi Perusahaan Terbuka yang ada.	Peraturan Direksi tersebut mencakup remunerasi berbasis variabel yang ditanggihkan maupun <i>Material Risk Taker</i> sebagaimana Peraturan Kementerian BUMN No. 04/MBU/2014 tentang Pedoman Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-3/MBU/03/2023 tanggal 20 maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. Sejak tahun 2009, Perseroan telah melaksanakan pemberian insentif jangka panjang berupa MESOP untuk Direksi dan Pegawai sebagaimana uraian pada bagian <i>Share Option</i> pada Laporan Tahunan ini. Pada tahun 2023, Perseroan telah menerapkan remunerasi berbasis kinerja dan risiko. Comply
E. Aspek 5 : Keterbukaan Informasi		
E.1. Prinsip 8 : Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi.		
E.1.1.	Rekomendasi 24: Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web sebagai media keterbukaan informasi. Penjelasan : Penggunaan teknologi informasi dapat bermanfaat sebagai media keterbukaan informasi. Adapun keterbukaan informasi yang dilakukan tidak hanya keterbukaan informasi yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun juga informasi lain terkait Perusahaan Terbuka yang dirasakan bermanfaat untuk diketahui pemegang saham atau investor. Dengan pemanfaatan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web diharapkan perusahaan dapat meningkatkan efektivitas penyebaran informasi perusahaan. Meskipun demikian, pemanfaatan teknologi informasi yang dilakukan tetap memperhatikan manfaat dan biaya perusahaan.	Perseroan senantiasa berupaya untuk meningkatkan kualitas keterbukaan informasi kepada <i>stakeholders</i> melalui pemanfaatan teknologi informasi, selain situs web Perseroan seperti melalui media sosial yaitu: • YouTube Bank BTN, • Facebook BankBTNCoid, • X @BankBTNCoid, • Instagram @bankbtn • LinkedIn PT BankTabungan Negara Perseroan juga memberikan penginian informasi kepada pemegang saham melalui <i>email</i>, <i>conference call</i> dan TV Pasar Modal IBCM <i>Channel</i> Bursa Efek Indonesia, selain pendampingan <i>site visit</i> oleh investor ke kantor cabang Bank BTN, <i>Non-Deal Roadshow</i>, <i>one-on-one meeting</i>, <i>Analyst Meeting Public Expose</i>. Comply
E.1.2.	Rekomendasi 25 : Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali. Penjelasan : Peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai penyampaian laporan tahunan Perusahaan Terbuka telah mengatur kewajiban pengungkapan informasi mengenai pemegang saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih saham Perusahaan Terbuka, serta kewajiban pengungkapan informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali Perusahaan Terbuka baik langsung maupun tidak langsung sampai dengan pemilik manfaat terakhir dalam kepemilikan saham tersebut. Dalam Pedoman Tata Kelola ini direkomendasikan untuk mengungkapkan pemilik manfaat akhir atas kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain mengungkapkan pemilik manfaat akhir dari kepemilikan saham oleh pemegang saham utama dan pengendali.	Perseroan telah mengungkapkan informasi mengenai pemegang saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih saham Perseroan kepada regulator yaitu OJK dan BEI. Pada Laporan Tahunan ini perihal dimaksud telah diungkapkan pada bagian Informasi kepada Investor. Comply

Governance Principles for Banks yang Diterbitkan oleh Basel Committee in Banking Supervision —

Pedoman Tata Kelola mencakup 12 prinsip *corporate governance*. Pedoman Tata Kelola adalah standar praktik terbaik yang bisa dijadikan acuan dalam penerapan tata kelola perusahaan di perbankan. Adapun uraian penerapannya dapat disampaikan sebagai berikut.

Prinsip	Penjelasan	Implementasi di Bank BTN
Prinsip 1 Tanggung Jawab Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris memiliki tanggungjawab yang antara lain: persetujuan dan pengawasan terhadap penerapan strategi bisnis, struktur dan mekanisme <i>governance</i> dan budaya perusahaan	Dalam Tata tertib Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana dituangkan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No.05/KOM/BTN/2023 tanggal 13 Desember 2023 perihal Pedoman dan Tata Kerja Dewan Komisaris, disebutkan bahwa tanggung jawab Dewan Komisaris adalah memberikan pendapat dan saran atas Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan serta memberikan saran atas hal yang dianggap penting oleh Perseroan dalam hal ini termasuk budaya perusahaan.
Prinsip 2 Kualifikasi dan Komposisi Dewan Komisaris.	Anggota Dewan Komisaris harus memiliki kualitas sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya, baik secara individu maupun secara kolektif. Dewan Komisaris harus memahami perannya dalam pengawasan dan penerapan <i>corporate governance</i> , serta mampu melaksanakan pengambilan keputusan secara sehat dan obyektif.	Dewan Komisaris Perseroan tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat memengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak Independen sebagaimana diatur dalam ketentuan Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> bagi Bank Umum dan telah menandatangani Surat Pernyataan Independen.
Prinsip 3 Struktur dan Mekanisme Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris harus menetapkan struktur dan praktik <i>governance</i> yang tepat dalam melaksanakan tugasnya dan secara periodik melakukan telaah atas efektivitasnya.	Dewan Komisaris mempunyai Komite di bawah Dewan Komisaris yang membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi.
Prinsip 4 Direksi.	Di bawah arahan dan pengawasan Dewan Komisaris, Direksi mampu mengelola kegiatan Bank sesuai dengan strategi bisnis, selera risiko, kebijakan remunerasi dan kebijakan lainnya yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris.	Direksi mengelola Perseroan di bawah arahan dan pengawasan Dewan Komisaris, terbukti dari pencapaian bisnis perusahaan yang meningkat dari tahun sebelumnya.
Prinsip 5 Struktur <i>Governance</i> Kelompok Usaha.	Dalam suatu kelompok usaha, Dewan Komisaris perusahaan induk memiliki tanggungjawab menyeluruh terhadap kelompok usaha tersebut dan untuk memastikan penetapan dan pelaksanaan praktek <i>governance</i> yang bersih terkait dengan struktur, bisnis, dan risiko kelompok usaha dan entitas. Dewan Komisaris dan Direksi harus memahami struktur organisasi kelompok usaha dan risiko yang dihadapi.	Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai bisnis utama serta risiko utama perusahaan, terbukti dari lolosnya seluruh Dewan Komisaris dan Direksi dari <i>Fit and Proper Test</i> . Direksi dan Dewan Komisaris juga senantiasa mengikuti pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan kemampuannya.
Prinsip 6 Fungsi Manajemen Risiko.	Perseroan harus memiliki fungsi manajemen risiko yang berkualitas, independen, memiliki sumber daya yang berkualitas dan memiliki akses dengan Dewan Komisaris.	Perseroan menjalankan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, Pengendalian Risiko, dan Sistem Informasi Manajemen Risiko melalui kerangka kerja <i>Enterprise Risk Management</i> (ERM). Perseroan senantiasa meningkatkan kapabilitas dan pengetahuan seluruh pegawai terutama dalam hal pengelolaan risiko Perseroan mengkomunikasikan manajemen risiko kepada Dewan Komisaris melalui Komite Pemantau Risiko.
Prinsip 7 Identifikasi Pemantauan dan Pengendalian Risiko.	Risiko harus diidentifikasi, dimonitor dan dikendalikan untuk seluruh kegiatan aktivitas Perseroan. Kualitas dari infrastruktur manajemen risiko dan pengendalian internal harus mampu mengikuti perubahan profil risiko Perseroan, kondisi risiko eksternal dan praktik industri.	Dalam pengelolaan Manajemen Risiko Perseroan telah dilakukan identifikasi, pengukuran dan penilaian risiko dengan menyusun profil risiko secara berkala. Pengukuran dan penilaian risiko telah dapat berjalan dengan baik sesuai Kebijakan Manajemen Risiko yang telah ditetapkan yang disesuaikan dengan tingkat risiko yang dihadapi Bank BTN.
Prinsip 8 Komunikasi Risiko.	Implementasi <i>risk governance</i> yang efektif membutuhkan komunikasi risiko yang akurat dalam lingkungan Perseroan baik antar organisasi maupun melalui pelaporan kepada Dewan Komisaris dan Direksi.	Penilaian <i>Risk Based Bank Rating</i> (RBBR) setiap semester disampaikan kepada Komite Manajemen Risiko. Selain itu, hasil penilaian RBBR disampaikan kepada Dewan Komisaris melalui Komite Pemantau Risiko.
Prinsip 9 Kepatuhan.	Dewan Komisaris bertanggungjawab dalam mengawasi manajemen terkait dengan risiko kepatuhan Perseroan. Dewan Komisaris harus menetapkan fungsi kepatuhan dan memberikan persetujuan terhadap kebijakan dan proses identifikasi, penilaian, pemantauan dan pelaporan, dan pemberian nasihat kepada risiko kepatuhan.	Dewan Komisaris memastikan terselenggaranya <i>good corporate governance</i> dalam setiap kegiatan usaha serta kebijakan tata kelola perusahaan, termasuk didalamnya pelaksanaan kepatuhan. Penilaian risiko kepatuhan dalam RBBR dilaporkan kepada Dewan Komisaris setiap 6 (enam) bulan sekali untuk mendapatkan <i>feedback</i> .

Prinsip	Penjelasan	Implementasi di Bank BTN
Prinsip 10 Audit Internal.	Fungsi audit internal harus melaporkan kegiatan independen <i>assurance</i> kepada Dewan Komisaris dan harus mendukung Dewan Komisaris dan Direksi dalam mendorong penerapan proses <i>governance</i> yang efektif serta kesehatan Bank dalam jangka panjang.	Internal Audit bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Utama dan berkomunikasi dengan Dewan Komisaris melalui Komite Audit.
Prinsip 11 Kompensasi.	Struktur remunerasi Perseroan harus mendukung penerapan <i>corporate governance</i> dan <i>risk management</i> .	Kebijakan remunerasi Perseroan saat ini telah sesuai dengan POJK Nomor 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.
Prinsip 12 Pengungkapan dan Transparansi.	Penerapan <i>governance</i> dari Perseroan harus dilaksanakan secara transparan kepada Pemegang Saham, Depositor, <i>Stakeholder</i> relevan lainnya dan Partisipan Pasar.	Perseroan melakukan pengungkapan melalui <i>website</i> Bank BTN www.btn.co.id dan memastikan tersedianya informasi paling <i>update</i> bagi <i>stakeholder</i> . Selain itu, keterbukaan informasi Bank BTN dilakukan melalui Laporan Tahunan, Laporan Keberlanjutan dan <i>Public Expose</i> .

Good Corporate Governance Assessment —

Perseroan senantiasa berupaya menerapkan *the highest standard of Corporate Governance* dengan mengacu kepada regulasi dan standard internasional berdasarkan prinsip-prinsip *Corporate Governance* yang dikembangkan oleh *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD), *ASEAN Corporate Governance Scorecard* (ACGS) yang diterbitkan oleh ASEAN Capital Market Forum (ACMF), Pedoman GCG Indonesia yang dikembangkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG), Pedoman GCG Perbankan Indonesia yang dikembangkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) dan *Principles for Enhancing Corporate Governance* yang diterbitkan oleh *Basel Committee on Banking Supervision*, dimana Perseroan telah melakukan penilaian tata kelola sebagai berikut:

Self Assessment

Penilaian *Self Assessment* Tata Kelola dilakukan secara berkala pada posisi akhir bulan Juni dan Desember setiap tahunnya. Untuk tahun 2023, standar penerapan Tata Kelola selain mengacu pada Peraturan OJK Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan ketentuan Surat Edaran OJK Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Kriteria Penilaian

Indikator yang menjadi standar pelaksanaan *Self Assessment* meliputi 11 (sebelas) parameter, yang terdiri dari:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite.
4. Penanganan benturan kepentingan.
5. Penerapan fungsi kepatuhan.
6. Penerapan fungsi *audit intern*.

7. Penerapan fungsi audit eksternal.
8. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern.
9. Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposure*).
10. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan bank, laporan pelaksanaan tata kelola perusahaan dan pelaporan internal.
11. Rencana strategis bank.

Pihak yang Melakukan Assessment

Perseroan melaksanakan *self assessment* tata kelola dengan melibatkan seluruh Dewan Komisaris, Direksi dan unit kerja yang terkait dengan faktor penilaian tata kelola dimaksud.

Skor Penilaian

Pada penilaian tata kelola Perseroan yang dilakukan pada tahun 2023, hasil penilaian sendiri (*Self Assessment*) sebagai berikut:

Hasil penilaian sendiri (*self assessment*) Tata Kelola Perusahaan yang dilakukan pada bulan Juni 2023

Hasil Penilaian Sendiri (<i>Self Assessment</i>) Pelaksanaan Tata Kelola)		
	Peringkat	Definisi Peringkat
Individual	2	Mencerminkan manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum baik . Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip Tata Kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip Tata Kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.

Hasil penilaian sendiri Tata Kelola Perusahaan yang dilakukan pada bulan Desember 2023

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment Pelaksanaan Tata Kelola)		
	Peringkat	Definisi Peringkat
Individual	2	Mencerminkan manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum baik . Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip Tata Kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip Tata Kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.

Dari kedua hasil penilaian tersebut, pelaksanaan tata kelola Perseroan pada tahun 2023 dapat disimpulkan sebagai berikut:

Nama Bank : PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk

Posisi : JANUARI-DESEMBER 2023

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment Pelaksanaan Tata Kelola)		
	Peringkat	Definisi Peringkat
Individual	2	Mencerminkan manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum baik . Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip Tata Kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip Tata Kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.

ANALISIS

Secara umum penerapan Tata Kelola Bank telah berjalan dengan baik, manajemen Bank telah melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola dan telah mempersiapkan struktur tata kelola yang mendukung penerapan tata kelola seperti struktur organisasi, sumber daya manusia yang kompeten dan kebijakan serta prosedur pendukung pelaksanaan aktivitas Bank. Selain itu, manajemen Bank dari waktu ke waktu juga melakukan upaya-upaya penyempurnaan agar pelaksanaan tata kelola dapat sejalan dengan perkembangan bisnis Bank. Perbaikan dilakukan dengan memperhatikan masukan dari Dewan Komisaris Bank berdasarkan hasil pemantauan/review/rekomendasi dari Komite yang mendukung tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

Pada periode pelaporan tidak terdapat pelanggaran prinsip kehati-hatian dalam pemenuhan CAR, Modal Inti, PDN dan NPL serta tidak terjadi pelampauan dan/atau pelanggaran BMPK. Komitmen Bank terkait dengan hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah ditindaklanjuti sesuai dengan target waktu yang disepakati.

Tujuan:

- Penilaian *governance structure* bertujuan untuk menilai kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Bank agar proses pelaksanaan prinsip Tata Kelola yang baik menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan Pemangku Kepentingan Bank. Yang termasuk dalam Struktur Tata Kelola Bank adalah Direksi, Dewan Komisaris, Komite dan Satuan Kerja pada Bank. Adapun yang termasuk infrastruktur Tata Kelola Bank antara lain adalah kebijakan dan prosedur Bank, sistem informasi manajemen serta tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi.
- Penilaian *governance process* bertujuan untuk menilai efektivitas proses penerapan prinsip Tata Kelola yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Bank sehingga menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan Pemangku Kepentingan Bank.
- Penilaian *governance outcome* bertujuan untuk menilai kualitas *outcome* yang memenuhi harapan Pemangku Kepentingan Bank yang merupakan hasil proses penerapan prinsip Tata Kelola yang baik, serta didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Bank.

Yang termasuk dalam *outcome* mencakup aspek kualitatif dan aspek kuantitatif, antara lain yaitu:

- Kecukupan transparansi laporan.
- Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
- Perlindungan konsumen.
- Obyektivitas dalam melakukan penilaian (*assessment*) atau audit.
- Kinerja Bank seperti rentabilitas, efisiensi dan pemerataan dan/atau
- Peningkatan/penurunan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, pelanggaran BMPK, pelanggaran ketentuan terkait laporan Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Berdasarkan analisis **Penilaian Sendiri (Self Assessment)** pelaksanaan Tata Kelola yang terdiri dari Struktur Tata Kelola (*Governance Structure*), Proses Tata Kelola (*Governance Process*), dan Hasil Tata Kelola (*Governance Outcome*) pada masing-masing faktor penilaian Tata Kelola, maka dapat disimpulkan bahwa:

A. Struktur Tata Kelola (*Governance Structure*)

Struktur Tata Kelola secara umum **memadai**, yang dapat dilihat dari rangkuman sebagai berikut:

1. Faktor-faktor Positif

- Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 2023 memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit at de charge*) kepada Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2022.
- Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahun buku 2022 yang dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 2023 telah diputuskan susunan keanggotaan Dewan Komisaris sebanyak 9 (sembilan) orang dan Direksi sebanyak 10 (sepuluh) orang.
- Pada posisi 31 Desember 2023 seluruh anggota Direksi telah dinyatakan lulus *fit and proper test* oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Direksi mempunyai integritas, kompetensi, dan pengetahuan yang sangat memadai.
- Seluruh anggota Direksi tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan, dan/atau lembaga lain.

ANALISIS

- 1.6 Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris maupun Pemegang Saham Pengendali Bank.
- 1.7 Direksi telah membentuk Komite ESG yang berperan dalam menetapkan dan menyusun kebijakan/strategi program ESG dan TJSL serta melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program ESG dan TJSL sesuai dengan Kebijakan Khusus Nomor KK.9-D tanggal 30 Maret 2023 tentang Prosedur Tata Kelola Komite Direksi yang dilakukan pembaruan kembali pada tanggal 21 Desember 2023.
- 1.8 Komposisi anggota Dewan Komisaris pada posisi 31 Desember 2023 berjumlah 8 (delapan) orang anggota dengan 4 (empat) orang di antaranya sebagai Komisaris Independen atau sebanyak 50% (lima puluh persen) dari total anggota Dewan Komisaris yang ada, hal ini sudah sesuai dengan ketentuan.
- 1.9 Pada posisi 31 Desember 2023 seluruh anggota Dewan Komisaris telah dinyatakan lulus *fit and proper test* oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- 1.10 Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan yang dikeluarkan oleh Regulator (OJK, BI, Peraturan Menteri dan ketentuan perundang-undangan lainnya).
- 1.11 Seluruh anggota Dewan Komisaris Independen tidak memiliki hubungan keuangan atau kepengurusan dengan Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali.
- 1.12 Bank BTN telah memiliki Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Nominasi & Remunerasi dengan struktur dan independensi keanggotaan sesuai dengan ketentuan yang berdasarkan:
 - 1.12.1 Surat Dewan Komisaris No.25/KOM/BTN/III/2022 tanggal 17 Maret 2022 perihal Penyampaian Keputusan Dewan Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk;
 - 1.12.2 Surat Dewan Komisaris No.26/KOM/BTN/III/2022 tanggal 17 Maret 2022 perihal Penyampaian Susunan Anggota Komite Organ Pendukung Dewan Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk;
 - 1.12.3 Surat Dewan Komisaris No.111/KOM/BTN/XI/2022 tanggal 16 November 2022 perihal Penyampaian Susunan Anggota Komite Organ Pendukung Dewan Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
 - 1.12.4 Surat Dewan Komisaris No. 13/KOM/BTN/I/2023 tanggal 18 Januari 2023 perihal Penyampaian Keputusan Dewan Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.;
 - 1.12.5 Surat Dewan Komisaris No. 14/KOM/BTN/I/2023 tanggal 18 Januari 2023 perihal Penyampaian Susunan Anggota Komite Organ Pendukung Dewan Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.;
 - 1.12.6 Surat Dewan Komisaris No. 47/KOM/BTN/III/2023 tanggal 08 Maret 2023 perihal Pengakhiran Masa Jabatan dan Pengangkatan Anggota Komite Audit PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.;
 - 1.12.7 Surat Dewan Komisaris No. 55/KOM/BTN/III/2023 tanggal 21 Maret 2023 perihal Penyampaian Keputusan Dewan Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.;
 - 1.12.8 Surat Dewan Komisaris No. 56/KOM/BTN/III/2023 tanggal 21 Maret 2023 perihal Penyampaian Susunan Keanggotaan Komite Organ Pendukung Dewan Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
 - 1.12.9 Surat Dewan Komisaris Nomor 101/KOM/BTN/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023 perihal Penyampaian Keputusan Dewan Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk;
 - 1.12.10 Surat Dewan Komisaris Nomor 102/KOM/BTN/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023 perihal Penyampaian Susunan Keanggotaan Komite Organ pendukung Dewan Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk;
- 1.13 Bank BTN telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penanganan benturan kepentingan yang diterapkan pada setiap kegiatan bisnis dan operasional yang dimuat dalam Kebijakan Khusus Nomor KK.6-H tanggal 10 Oktober 2023 tentang Prosedur Penanganan Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*).
- 1.14 Satuan Kerja Kepatuhan Bank BTN merupakan satuan kerja yang independen atau terpisah dari satuan kerja *operasional (risk taking unit)*.
- 1.15 Direktur yang membidangi Fungsi Kepatuhan telah memenuhi persyaratan independensi dan tidak merangkap sebagai Direktur Utama/Wakil Direktur Utama, Direktur yang membidangi bisnis & operasional, manajemen risiko, *treasury*, keuangan & akuntansi, logistik dan pengadaan barang/jasa, teknologi informasi, audit intern, serta Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan Bank BTN telah dinyatakan lulus *fit and proper test* dari OJK.
- 1.16 Bank BTN telah memiliki Satuan Kerja Audit Internal yang disebut *Internal Audit Division* (IAD) yang bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Utama dan dapat melakukan komunikasi secara langsung kepada Dewan Komisaris atau Komite Audit.
- 1.17 Bank BTN telah menyusun dan *mereview* secara berkala terhadap Piagam Audit Intern, struktur organisasi Satuan Kerja Audit Internal serta tugas dan fungsi.
- 1.18 Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk laporan keuangan 2023 telah ditetapkan dan memenuhi kriteria yang ditentukan.
- 1.19 Bank BTN telah memiliki Satuan Kerja Manajemen Risiko yaitu *Enterprise Risk Management Division* (ERMD).
- 1.20 Bank telah memiliki kebijakan penyediaan dana secara lengkap, termasuk alat monitoring dan langkah penyelesaiannya serta melakukan evaluasi kebijakan secara berkala. Evaluasi kebijakan dilakukan oleh divisi terkait melibatkan dan berkoordinasi dengan divisi-divisi lainnya, termasuk *Compliance & Governance Division* (CMGD), *Enterprise Risk Management Division* (ERMD) dan *Legal Division* (LGD) melalui *Policy and Procedure Division* (PPD) yang selanjutnya diusulkan kepada Komite Kebijakan Kredit melalui Direksi.
- 1.21 Bank memiliki kebijakan dan prosedur mengenai tata cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan yang terdiri dari peraturan internal dan eksternal (regulator).
- 1.22 Rencana strategis Bank telah dibentuk Rencana Korporasi dan Rencana bisnis sesuai dengan visi dan misi Bank.
- 1.23 Direksi telah menetapkan 5 Fokus Utama & 10 Inisiatif strategis.

2. Faktor-faktor Negatif

Tidak ada.

3. Identifikasi Permasalahan dan Penyebab (*Root Cause*)

Tidak ada.

4. Kekuatan

- 4.1 Dewan Komisaris dan Direksi Bank BTN berkomitmen untuk memenuhi dan memperbaiki struktur dan infrastruktur Tata Kelola agar selalu menyesuaikan ketentuan regulator, pengawas dan mengikuti dinamika kebutuhan bisnis.
- 4.2 Penerapan Tata Kelola yang baik di Bank BTN didukung dengan struktur perangkat Satuan Kerja Audit Intern, Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Kepatuhan yang independen.

B. Proses Tata Kelola (*Governance Process*)

Proses Tata Kelola secara umum **memadai**, yang dapat dilihat dari rangkuman sebagai berikut:

1. Faktor-Faktor Positif

- 1.1 Direksi telah menetapkan kebijakan dan keputusan yang bersifat strategis melalui Rapat Direksi secara efektif dan efisien yang dikomunikasikan kepada seluruh karyawan melalui berbagai media seperti *Digital Room for Elearning Modules* (DREAMS), *Legal Application Systems* (LAPS) dan lainnya.

ANALISIS

- 1.2 Direksi telah melakukan *performance review* rutin dengan seluruh Divisi & Kanwil, serta Komitmen Dewan Komisaris melakukan *performance review* bersama Direksi secara bulanan.
- 1.3 Direksi telah menindaklanjuti temuan dan rekomendasi dari *Internal Audit Division*, Auditor Eksternal, hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya.
- 1.4 Dalam hal melaksanakan tugas dan tanggung jawab Direksi, pada periode Januari-Desember 2023 Direksi telah melaksanakan Rapat Internal sebanyak 255 (dua ratus lima puluh lima) kali rapat.
- 1.5 Komite-komite dibawah Direksi telah melaksanakan rapat pada periode Januari-Desember 2023 sebanyak 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) kali rapat. Adapun rinciannya sebagai berikut:
 - a. Komite Aset-Liabilitas 14 kali rapat.
 - b. Komite Pengarah Teknologi Informasi 4 kali rapat.
 - c. Komite Manajemen Risiko 16 kali rapat.
 - d. Komite *Human Capital* 19 kali rapat.
 - e. Komite Kebijakan Perkreditan atau pembiayaan 9 kali rapat.
 - f. Komite Kredit 240 kali rapat.
 - g. Komite Bisnis 6 kali rapat.
 - h. Komite Pengarah Transformasi 25 kali rapat.
- 1.6 Dewan Komisaris senantiasa memastikan terselenggaranya prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan dalam setiap kegiatan usaha Bank.
- 1.7 Dalam hal melaksanakan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, pada periode Januari-Desember 2023 Dewan Komisaris sudah melaksanakan Rapat Internal sebanyak 52 (lima puluh dua) kali rapat dan Rapat bersama Direksi sebanyak 6 (enam) kali.
- 1.8 Komite senantiasa melaksanakan tugasnya secara independen melalui pertemuan yang dilakukan secara rutin dengan Divisi atau Unit Kerja terkait permasalahan dan kondisi operasional Bank BTN.
- 1.9 Masing-masing Komite telah melaksanakan fungsinya sesuai ketentuan antara lain pemberian rekomendasi sesuai tugas kepada Dewan Komisaris. Pada periode Januari-Desember 2023 komite-komite dibawah Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat sebagai berikut:
 - a. Komite Audit sebanyak 35 kali.
 - b. Komite Pemantau Risiko sebanyak 52 kali.
 - c. Komite Remunerasi dan Nominasi sebanyak 23 kali.
- 1.10 Bank BTN telah mengimplementasikan aplikasi pemrosesan kredit (*iLoan*) dimana didalamnya mencakup aspek Pihak Terkait Bank dengan tujuan untuk memastikan proses kredit terbebas dari benturan kepentingan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah dikomunikasikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi.
- 1.11 Peningkatan pelaksanaan Budaya Perusahaan yaitu: *Sales Culture, Performance Culture, Governance & Risk Culture* dan *Learning Culture*.
- 1.12 Bank BTN telah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Direktur yang membidangi Fungsi Kepatuhan kepada regulator secara tepat waktu.
- 1.13 Untuk memastikan setiap peraturan yang akan dibuat, Satuan Kerja Kepatuhan melakukan kajian/*review* untuk memastikan peraturan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan dari regulator maupun perundang-undangan. Pada periode Januari-Desember 2023 Satuan Kerja Kepatuhan telah melakukan kajian dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Bidang Operasional sebanyak 231 kajian.
 - b. Bidang Kredit sebanyak 102 kajian.
 - c. Bidang Dana sebanyak 34 Kajian.
- 1.14 Dalam upaya mencegah praktik-praktik korupsi sejak dini Bank BTN melaksanakan implementasi sertifikasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), dimana tahun 2023 Bank BTN melakukan audit *re-sertifikasi* dan *surveillance* ISO pada 10 Unit Kerja serta melakukan perluasan lingkup ISO SMAP pada 5 unit kerja (SMBD dan 4 CBC).
- 1.15 Dalam upaya meningkatkan budaya kepatuhan Bank BTN melakukan implementasi ISO 37301:2021 Sistem Manajemen Kepatuhan (SMK), Bank telah berhasil memperoleh sertifikasi ISO SMK yang efektif pada tanggal 23 Januari 2023 serta melaksanakan *surveillance* pada November 2023.
- 1.16 Pada tahun 2023 Internal Audit Division telah melakukan kaji ulang pelaksanaan fungsi audit intern Bank oleh pihak independen sebagaimana diatur pada POJK 01 2019 dan memperoleh hasil "*Generally Conform*".
- 1.17 Pelaksanaan *Whistleblowing System* Bank BTN telah menggunakan jasa pihak ketiga yaitu *Deloitte Consultant* yang disebut WBS BTN SIIPS dan Bank BTN telah bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait *Whistleblowing System* (WBS) Tindak Pidana Korupsi (TPK) Ter-integrasi.
- 1.18 Penerapan fungsi audit intern telah memadai dan memenuhi harapan *stakeholders*, hal ini tercermin dari laporan yang disampaikan oleh *Internal Audit Division* kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit secara berkala (setiap triwulan), yaitu realisasi Rencana Audit Tahunan, temuan dan rekomendasi audit, serta penyelesaian tindak lanjut hasil audit.
- 1.19 Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah sesuai dengan persyaratan minimum yang ditetapkan sesuai ketentuan dan pelaksanaan audit dilakukan oleh Akuntan Publik (AP) yang independen serta rekomendasi Komite Audit melalui Dewan Komisaris.
- 1.20 Bank telah melakukan monitoring *Risk Appetite* dan *Risk Tolerance* secara bulanan termasuk analisis pelampauan dan dampak serta rekomendasi dan arahan manajemen pada laporan pemantauan *Risk Appetite* dan *Risk Tolerance* yang dilaporkan setiap bulan yang disampaikan secara rutin kepada Direksi dan seluruh Divisi.
- 1.21 Direksi dan Dewan Komisaris melakukan pengawasan manajemen risiko secara aktif dengan melakukan pembahasan limit risiko (*risk appetite* dan *risk tolerance*) setiap bulan melalui rapat Dewan Komisaris dan Direksi.
- 1.22 Melakukan perbaikan proses bisnis diantaranya:
 - a. Bank telah melakukan pemisahan Divisi CRSD menjadi CRSD 1 dan CRSD 2 untuk pemisahan pengelolaan *Early Bucket* dan *Late Bucket* untuk menjaga kualitas portofolio kredit Bank.
 - b. Bank telah membentuk *Personal Banking Division* (PBD) dalam rangka mendukung pencapaian *high yield loan*.
 - c. Pembentukan *Human Capital Business Partner* (HCBP) yang berperan sebagai *partner* bisnis yang efektif dalam mendorong dan memastikan keselarasan strategi dan operasional *Human Capital* untuk memenuhi kebutuhan bisnis dan mendukung strategi korporasi.
 - d. Pembentukan *Environmental, Social & Governance* (ESG Department) dalam rangka mendukung penerapan prinsip keuangan berkelanjutan (SDGs).
 - e. Bank telah membentuk RLPC-BC (*Regional Loan Processing Center-Business Control*), CBC-BC (*Commercial Banking Center-Business Control*) dan RBC (*Regional Business Control*) di bawah supervisi Kantor Wilayah dan garis koordinasi ke Satuan Kerja Manajemen Risiko yang berfungsi untuk meningkatkan pengawasan dan mitigasi Risiko Operasional Kantor Cabang dan Kantor Wilayah.
 - f. Telah dilakukan pengembangan sistem *Operational Risk Management Information System* (ORMIS) yang terdiri dari RCSA, LED dan KRI pada masing masing unit kerja. saat ini ORMIS telah diimplementasikan pada seluruh Kantor Wilayah dan Kantor Cabang.
 - g. Implementasi BPI Kredit Konsumer Fase 2 yang mencakup proses pencairan otomatis dan *management stock*.

ANALISIS

- h. Implementasi Digitalisasi & automation project/otomatisasi proyek (BPI *Consumer Project: Decision Engine*).
- i. Sentralisasi proses operasional ke Wilayah dan Kantor Pusat, melalui sentralisasi proses pengadaan dan pengelolaan vendor, sentralisasi proses akuntansi dan *reporting*, sentralisasi pengelolaan kas melalui implementasi *Regional Cash Operation Management*.
- j. Optimalisasi KCP yang tidak produktif melalui Substitusi layanan ke *Digital Channel* dengan menutup outlet / KCP yang tidak produktif.
- k. Implementasi *Sales Center* yang bertugas untuk melakukan pengelolaan KPR Non Subsidi untuk *Segment Emerging Affluent*.
- l. Pembentukan sentra kredit UMKM BTN yang bertugas untuk menyalurkan produk Kredit Mikro BTN yaitu KUR dan Kredit SME s.d. Rp. 500 Juta.
- m. Penguatan Organisasi BTN melalui penerapan *Strategic Business Unit* (SBU).
- 1.23 Melakukan penguatan disiplin proses dan kontrol berjenjang pada setiap tahapan bisnis proses perkreditan, sejalan dengan peningkatan kredit kualitas rendah yang cukup tinggi, dan proses pemberian kredit dilakukan secara komprehensif dengan memperhatikan aspek 5 C's secara konsisten.
- 1.24 Dalam pengambilan keputusan, Bank BTN telah membentuk Komite Kebijakan Kredit dan Komite Kredit agar proses perkreditan bisa berjalan *prudent*.
- 1.25 Selama periode Januari-Desember 2023, tidak terdapat pelanggaran dan/atau pelanggaran BMPK.
- 1.26 Bank BTN telah menyusun, menyajikan dan mentransparasikan kondisi keuangan dan non-keuangan kepada *stakeholder* secara bulanan, triwulan, semester dan tahunan dengan mempublikasikan di *website* resmi termasuk mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi triwulan dan melaporkannya kepada Otoritas Jasa Keuangan *stakeholder* sesuai ketentuan yang berlaku.
- 1.27 Bank BTN telah memiliki Sistem Pengaduan Nasabah yang dapat digunakan oleh Nasabah melalui *Contact Center*, Sistem Pengaduan Nasabah (SPN), *Customer Service* atau disampaikan melalui petugas Bank.
- 1.28 Laporan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan telah disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan atau *stakeholder* sesuai ketentuan yang berlaku.
- 1.29 Direksi telah mengkomunikasikan Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis Bank kepada seluruh jenjang organisasi dan Pemegang Saham Pengendali.
- 1.30 Dewan Komisaris telah melakukan fungsi dan tugasnya dalam hal pengawasan (monitoring) yaitu mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank secara rutin setiap 1 (satu) bulan sekali dalam rapat *Performance Review* antara Direksi dan Dewan Komisaris.
- 1.31 Direksi melakukan pembahasan secara rutin terkait kebijakan dan keputusan terkait rencana strategis melalui rapat komite yang didahului pra-komite/*steering committee*.
- 1.32 Dalam rangka mendukung visi untuk menjadi *Best Mortgage Bank* di Asia Tenggara, Bank BTN melakukan penguatan kapasitas dan sistem organisasi dengan penguatan peran pemimpin. Bank BTN membekali para pimpinan untuk membantu mengeksekusi 5 (lima) fokus BTN tahun 2021-2025 dengan membentuk *performance culture*, melakukan monitoring yang meningkatkan *engagement team*, konsisten melakukan perilaku utama serta terus menerus melakukan perbaikan yaitu dengan mengimplementasikan konsep disiplin eksekusi 4DX.
- 1.33 Bank mengimplementasikan 4DX secara nasional (*bankwide*) dengan tujuan program membentuk budaya kinerja dengan hasil yang unggul. Secara umum implementasi tersebut dibagi menjadi 3 tahap, yaitu Tahap *Leadership Emphasize* dan Tahap *Setting Up* serta Tahap Implementasi.

2. Faktor-faktor Negatif

Secara umum pengendalian Internal sudah memadai namun masih belum berjalan dengan optimal sehingga menimbulkan kasus *fraud*.

3. Identifikasi Permasalahan dan Penyebab (Root Cause)

Secara keseluruhan *Governance Process* dilaksanakan dengan baik dalam setiap kegiatan bisnis dan operasional Bank, namun dalam pelaksanaannya masih diperlukan pemahaman *Standard Operating Procedure* (SOP) dan perlu peningkatan supervisi.

4. Kekuatan

- 4.1 Peningkatan implementasi Budaya Perusahaan untuk mendukung Bank BTN dengan berlandaskan *core values* AKHLAK yaitu: *Sales & Service Culture, Governance & Risk Culture, Performance Culture* dan *Learning Culture*.
- 4.2 Bank terus berupaya untuk meningkatkan pengendalian internal melalui: *training/internalisasi*, pemberian sanksi untuk pembinaan, pelaksanaan rotasi serta mutasi SDM.
- 4.3 Dalam pengambilan keputusan Bank BTN telah membentuk Komite Kebijakan Kredit dan Komite Kredit agar proses perkreditan bisa berjalan *prudent*.
- 4.4 Dalam rangka penerapan pengendalian gratifikasi dan suap, Bank BTN telah memiliki Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG), dan sertifikasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang berada di bawah supervisi dan kelolaan Divisi Kepatuhan.

C. Hasil Tata Kelola (Governance Outcome)

Hasil Tata Kelola secara umum **Memadai**, yang dapat dilihat dari rangkuman sebagai berikut:

1. Faktor-faktor Positif

- 1.1 Dewan Komisaris dan Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dan telah diterima oleh pemegang saham dalam RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 yang dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 2023.
- 1.2 Bank melakukan peningkatan kinerja guna merealisasikan target RBB 2023-2025 melalui penetapan strategi bisnis yang efektif.
- 1.3 Laporan Keuangan posisi 31 Desember 2023 (*Unaudited*) lebih baik dari tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut: (dalam miliar)

No	Kinerja	Posisi Desember 2022	Posisi Desember 2023 (Unaudited)
1	Aset	402,148	439,885
2	Laba	3,045	3,419
3	DPK	321,624	349,933
4	Kredit/Pembiayaan	298,282	333,698
5	Kualitas Kredit	3,38%	3,01%

1.4 Indikator Kepatuhan posisi Desember 2023

- 1.4.1 Rasio permodalan CAR (*Capital Adequacy Ratio*) yang telah dibentuk Bank setelah memperhitungkan risiko kredit, risiko operasional, dan risiko pasar pada posisi 31 Desember 2023 adalah 20,14%, sedangkan rasio KPMM (Kewajiban Penyediaan Modal Minimum) sesuai profil risiko yang wajib dibentuk Bank untuk posisi 31 Desember 2023 sebesar 9,18%. Dengan demikian maka rasio kecukupan modal Bank BTN masih berada di atas batas minimum dari yang dipersyaratkan regulator dalam ketentuan permodalan.

ANALISIS

- 1.4.2 Tidak ada pelampauan maupun pelanggaran terhadap ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).
- 1.4.3 *Non-Performing Loan* (NPL) adalah 3,01 % (*gross*).
- 1.4.4 Giro Wajib Minimum (GWM) Primer Rupiah Konvensional posisi 29 Desember 2023 adalah 6,0361% sehingga memenuhi ketentuan batas minimum 3%. Giro Wajib Minimum (GWM) Valuta Asing posisi 29 Desember 2023 adalah 4,397% memenuhi ketentuan batas minimum 4%.

2. Faktor-faktor Negatif

- 2.1 Selama periode Januari sd. Desember 2023, terdapat denda GWM Valas Bank BTN sebesar Rp. 28.670.854,- (dua puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah).
- 2.2 Selama periode Januari s.d Desember 2023, terdapat pengenaan denda sebesar Rp 677,520,854,- (enam ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus dua puluh ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah). Terdapat peningkatan jumlah denda dari Regulator dibandingkan dengan periode yang sama Januari s.d Desember 2022 yaitu sebesar Rp 290,313,449,- (dua ratus sembilan puluh juta tiga ratus tiga belas ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah).
- 2.3 Masih terdapat jumlah pelanggaran terhadap ketentuan yang mengakibatkan terjadinya *fraud* dimana periode Januari sd. Desember tahun 2023 jumlah *fraud* sebanyak 19 (sembilan belas). Angka ini sama dengan jumlah pelanggaran terhadap ketentuan yang mengakibatkan terjadinya *fraud* pada periode Januari sd. Desember 2022 sebanyak 19 (sembilan belas) kasus.

3. Identifikasi Permasalahan dan Penyebab (*Root Cause*)

- 3.1 Perlunya peningkatan pemahaman SOP dan penguatan supervisi.
- 3.2 Perlunya penyempurnaan sistem dan infrastruktur pelaporan.

4. Kekuatan

- 4.1 Bank BTN telah menetapkan arah jangka panjang yaitu menjadi *Best Mortgage Bank* di Asia Tenggara yang akan dicapai melalui implementasi lima fokus strategi jangka panjang dengan aspirasi bisnis Bank BTN yang ingin dicapai di tahun 2025 sebagai berikut:
 - 4.1.1 Menggandakan *low-cost funding* menjadi IDR 250 Triliun.
 - 4.1.2 Mendorong keterjangkauan akses perumahan bagi lebih dari 6 Juta masyarakat Indonesia.
 - 4.1.3 Membangun *one stop shop financial solution* untuk 3 Juta konsumen dan bisnis terkait perumahan.
 - 4.1.4 Menjadi *inovator digital* dan *home of Indonesia's best talent*.
 - 4.1.5 Membangun portofolio berkualitas tinggi dan mempertahankan tingkat NPL yang rendah.
- 4.2 Bank BTN berpedoman pada 10 (sepuluh) tema strategis diantaranya:
 - 4.2.1 Penyempurnaan model operasi cabang untuk meningkatkan DPK *low-cost* dan bisnis ritel dengan mengoptimalkan *footprint* jaringan dan membangun *customer ownership* secara *end to end* (segmen komersial, SME, konsumen) termasuk *funding*, *lending*, *fee based* dan layanan lainnya.
 - 4.2.2 Kemitraan / pertumbuhan anorganik untuk mendukung bisnis utama di sektor perumahan, menangkap peluang di bidang *multifinance*, asuransi & manajemen aset.
 - 4.2.3 Pengembangan dari pembiayaan perumahan untuk segmen *emerging affluent* dan *affluent*, dengan meningkatkan proposisi *direct-to-direct*, serta bekerja sama dengan developer terkemuka dan jaringan agen *real estate*.
 - 4.2.4 Pengembangan program kepemilikan rumah untuk KPR bersubsidi dalam mendukung agenda nasional perumahan terjangkau.
 - 4.2.5 Memperluas *value chain* dalam *real estate* yang menyasar UKM *supplier* dan kontraktor dengan menyediakan *supply chain financing*, *bank guarantee*, SKBDN dan solusi tabungan bisnis.
 - 4.2.6 Mengembangkan solusi keuangan yang lengkap (pinjaman, tabungan, transaksi, dan investasi) menyasar nasabah berpendapatan tetap, khususnya bagi *emerging affluent* dan SME, serta menyiapkan strategi *cross-selling* dan *upselling*.
 - 4.2.7 Mengembangkan *channel* transaksi elektronik, otomatisasi berbagai proses bisnis dan mengembangkan kerja sama dengan ekosistem digital, termasuk pengaturan infrastruktur IT pendukung dan model operasional.
 - 4.2.8 Penerapan struktur SBU yang sesuai untuk menciptakan organisasi berorientasi pada kinerja, membangun kapabilitas *hard & soft skill*, serta peluncuran *Sales & Service Culture*, *Governance & Risk Culture*, *Performance Culture*, dan *Learning Culture*.
 - 4.2.9 Proses bisnis kredit yang lebih baik dengan sentralisasi operasi kredit (CBC, SME, *consumer*), meningkatkan *check and balances*, dan memperkuat kerangka risiko melalui pedoman risiko yang tepat.
 - 4.2.10 Mempertahankan tingkat NPL yang rendah di semua segmen melalui pemantauan risiko yang kuat, standarisasi pengerjaan, proses penagihan yang memanfaatkan sosial digital, serta strategi penjualan aset.

Rekomendasi dan Tindaklanjutnya

Permasalahan	Tindak lanjut
Selama periode Januari sampai dengan Desember 2023, terdapat peningkatan jumlah denda dari Regulator dibandingkan dengan periode yang sama Januari sampai dengan Desember 2022	- Himbauan Direksi melalui memo kepada seluruh Divisi, Kantor Wilayah, Kantor Cabang/Kantor Cabang Syariah terkait Mitigasi Sanksi Denda dan/atau Teguran Tertulis dari Regulator. - Satuan Kerja Kepatuhan berkoordinasi dengan melakukan <i>remapping</i> dan <i>update</i> kewajiban pelaporan ke Regulator serta penanggung jawab penyampaian Pelaporan pada masing-masing Divisi. Untuk selanjutnya, Satuan Kerja Kepatuhan juga menyampaikan agar seluruh Divisi secara aktif berkoordinasi menyampaikan update laporan regulator yang baru kepada Satuan Kerja Kepatuhan apabila belum terdapat di dalam daftar pelaporan eksisting di Compliance Regulatory Management System (CRMS). - Melalui Compliance Regulatory Management System (CRMS) telah disampaikan email notifikasi sebagai reminder sebelum jatuh tempo laporan kepada seluruh Divisi yang memiliki kewajiban pelaporan kepada Regulator dan/atau pihak eksternal serta monitoring pengembangan Produk Bank baru (PPB) dan Kegiatan Baru untuk Kepentingan Bank (KKB) dan Kegiatan sebagai Penyedia Jasa Teknologi Informasi dan/atau menerbitkan Produk Layanan Perbankan Elektronik untuk reminder kewajiban laporan realisasi kepada Regulator. Saat ini sedang dilakukan <i>enhancement</i> CRMS terkait penambahan notifikasi/<i>reminder</i> kewajiban pelaporan ke masing-masing PIC Divisi dan Pejabat Divisi melalui media Whatsapp selain email. - Satuan Kerja Kepatuhan bersama dengan Satuan Kerja Pengelola Data dan Satuan Manajemen Risiko telah melakukan pembahasan Peraturan Teknis (PT) tentang Tata Kelola Data khususnya terkait RACI (<i>Responsible, Accountable, consulted</i> dan <i>Informed</i>) Matriks Proses Pelaporan ke Regulator salah satunya menambahkan aktivitas validasi data oleh Divisi Pemilik Data (<i>Data Owner</i>) untuk memastikan kualitas dan kebenaran data sebelum dilaporkan oleh Divisi Penanggung Jawab Pelaporan ke Regulator. Hal tersebut diharapkan dapat memberikan dampak perbaikan pada proses pelaporan ke Regulator sehingga memenuhi prinsip Lengkap, Akurat, Kini dan Utuh (LAKU) untuk memitigasi adanya kesalahan data dan terjadinya temuan berulang oleh Regulator. - Satuan Kerja Kepatuhan dan Satuan Kerja Manajemen Risiko melakukan pembahasan dan <i>mapping</i> bersama Divisi terkait pemisahan tugas (<i>segregation of duties</i>) terkait proses pelaporan ke Regulator atau Otoritas Pengawas lainnya tersebut di atas yaitu fungsi <i>maker, checker</i> dan <i>approval</i> mulai dari pemilik data, penyedia data dan penanggungjawab pelaporan. - Satuan Kerja Kepatuhan telah mengembangkan <i>Compliance Dashboard</i> untuk memitigasi potensi ketidakpatuhan dengan menyampaikan konfirmasi dan verifikasi data parameter Compliance Dashboard kepada Unit Kerja terkait.

Penilaian Pihak Eksternal

Selain melaksanakan *Self Assessment*, Perseroan juga secara konsisten telah melaksanakan *third party assessment* untuk mendapatkan *second opinion* terhadap kualitas implementasi GCG dalam rangka perbaikan kualitas implementasi GCG secara berkelanjutan, diantaranya adalah survei *Corporate Governance Perception Index* selanjutnya disingkat CGPI setiap tahun yang diadakan oleh *Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG) dan Penilaian GCG berdasarkan standar *ASEAN Corporate Governance Scorecard* dilakukan oleh OJK dan *Indonesian Institute for Corporate Directorship* (IICD).

Rating GCG - Corporate Governance Perception Index (CGPI) Award

Perseroan senantiasa mengikuti rating dan survei *Corporate Governance Perception Index* selanjutnya disingkat CGPI setiap tahun yang diadakan oleh Indonesian Institute for *Corporate Governance* (IICG). CGPI merupakan program riset dan pemeringkatan penilaian kualitas *corporate governance* dengan tahapan penilaian sebagai berikut:

1. Tahapan Analisis Instrumen dan Dokumen Tahapan ini dilakukan melalui kegiatan berikut:
 - a. *Self Assessment*.
 - b. Penilaian Dokumen.
2. Tahapan Observasi
Tahapan observasi dilakukan melalui klarifikasi instrument penilaian dan kelengkapan dokumen yang dimiliki perusahaan melalui paparan eksekutif dan diskusi organ perusahaan.

Kriteria Penilaian

Aspek penilaian dalam CGPI meliputi antara lain Struktur Tata Kelola (*Governance Structure*), Proses Tata Kelola (*Governance Process*), dan Hasil Tata Kelola (*Governance Outcome*).

Hasil Penilaian CGPI Tahun 2018-2023

Indikator	Tahun Pelaksanaan					
	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Governance Structure	29,98	25,18	31,83	24,30	30,91	22,73
Governance Process	29,70	34,46	32,53	32,53	28,49	38,01
Governance Outcome	30,84	30,38	24,47	32,79	29,22	27,23
Skor CGPI	90,52	90,02	89,83	89,62	88,62	87,97

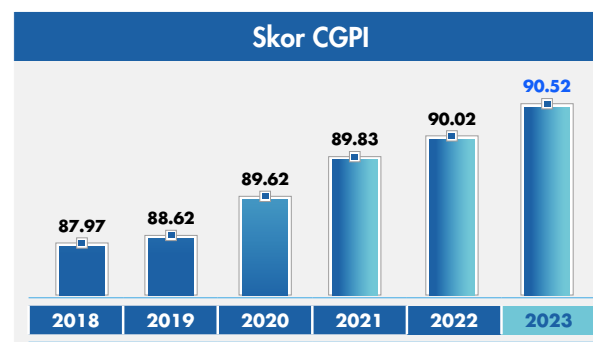
Dalam periode 5 (lima) tahun terakhir, penilaian yang diberikan oleh IICG dalam keikutsertaan bank BTN dalam CGPI selalu mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi pelaksanaan GCG di Bank BTN semakin baik dari tahun ke tahun.

Pihak Yang Melakukan Assessment

Pihak yang melakukan penilaian CGPI yaitu The Indonesian Institute of Corporate Governance (IICG).

Skor Penilaian

Skor CGPI Perseroan pada tahun 2023 sebesar 90,52 dengan predikat "*Most Trusted*". Adapun hasil penilaian CGPI selama 6 (enam) tahun berturut-turut adalah sebagai berikut:



Rekomendasi dan Tindaklanjutnya

Terdapat beberapa rekomendasi perbaikan dari The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) terhadap pelaksanaan CGPI 2022. Rekomendasi tersebut menjadi bahan penyempurnaan dan perbaikan yang ditindaklanjuti implementasinya dalam penerapan tata kelola di Perseroan.

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut Perseroan
Governance Structure		
1	Bank BTN perlu menyusun rancangan struktur organisasi yang sesuai dengan rencana bisnis perusahaan serta memenuhi kekosongan formasi struktur fungsional yang menjadi tanggung jawab Direksi.	1. Program pengembangan <i>Talent</i> yang dijalankan Bank BTN untuk pemenuhan terhadap kekurangan pegawai pada posisi L1 dan L2 2. Struktur organisasi Bank BTN sudah sesuai dengan rencana strategi bisnis Perseroan dan aspirasi Direksi maupun strategi yang telah dituangkan pada <i>Corporate Plan</i>, diantaranya pada tahun 2022 telah membentuk: a. Divisi IT <i>Security</i>, membentuk struktur jabatan pada fungsi risiko dan kepatuhan b. <i>Wholesale Transaction Division</i> menjadi Divisi yang melakukan pengelolaan <i>Wholesale Banking</i>.
2	Bank BTN perlu mengembangkan struktur dan/atau fungsi khusus yang bertanggung jawab dalam melakukan integrasi dan konsolidasi sistem GRC (<i>Governance Risk Compliance</i>) di grup perusahaan.	Memperkuat organ pada Kantor Wilayah diantaranya: a. Penguatan fungsi <i>control</i> dengan membentuk <i>Regional Business Control</i> (RBC) yang membawahi <i>Branch Business Control</i>, <i>CBC Business Control</i> (CBC-BC), dan <i>Regional Loan Processing Center Business Control</i> (RLPC-BC). b. Melakukan koordinasi dan pembahasan terkait pengembangan struktur organisasi dan/atau fungsi khusus yang bertanggung jawab dalam melakukan integrasi dan konsolidasi sistem GRC.
3	Bank BTN perlu mengoptimalkan pengembangan kepemimpinan di perusahaan untuk memastikan ketersediaan calon pemimpin perusahaan yang kompeten, kompetitif, adaptif dan lincah dalam menghadapi dinamika perubahan secara berkelanjutan.	1. Perseroan telah menjalankan program suksesi melalui implementasi <i>Talent Acceleration</i> Program mulai tahun 2022 sebanyak 80 pegawai untuk tahap pertama. Untuk tahap selanjutnya Bank BTN sudah menyiapkan sebanyak 106 pegawai. 2. Perseroan sudah memiliki program pengembangan kepemimpinan yang meliputi jenjang pendidikan mulai dari ODP, SDP, MDP, SMD, VPDP dan Sespi Bank. 3. <i>Review</i> dan penyempurnaan kebijakan perencanaan karir dan program kepemimpinan Bank.
4	Bank BTN perlu melakukan penyesuaian kebijakan dan strategi perusahaan secara berkala agar di setiap dinamika perubahan yang terjadi secara hati-hati mengeksplorasi tantangan yang muncul, mengelola kerentanan, beradaptasi mengelola perubahan, dan mengambil peluang dengan mengoptimalkan potensi sehingga dapat meraih tujuannya berdasarkan capaian terbaik.	1. Perseroan telah memiliki rencana dan strategi perusahaan yang tercantum dalam RJP yang di turunkan ke dalam RBB dan RKAP 2. Pembaruan Kebijakan SOP Sistem Manajemen Kinerja Bank BTN (STORM) dengan menyusun Kebijakan Khusus Rencana Strategis dan <i>Performance</i> 3. Implementasi arsitektur kebijakan baru yang meliputi: • Penerbitan 9 Kebijakan Umum sebagai <i>Umbrella Policy</i> pada Peraturan Internal Bank BTN. • Penerbitan 66 Kebijakan Khusus sebagai turunan dari Kebijakan Umum Peraturan Bank. • Pencabutan peraturan arsitektur lama sebanyak 401 Peraturan. 4. <i>Go Live</i> aplikasi PPDigital sebagai sarana pencarian peraturan bagi pegawai.
Governance Process		
1	Bank BTN perlu mengoptimalkan seluruh sumber daya untuk membangun ketangguhan perusahaan melalui program penguatan fundamental dan ketangguhan perusahaan yang terintegrasi dengan grup perusahaan.	1. Perseroan telah mengimplementasikan program <i>talent mobility</i> sebagai salah satu program untuk menempatkan <i>talent</i> terbaik Perseroan pada perusahaan afiliasi. Saat ini terdapat 4 orang yang telah diikutkan dalam program tersebut. 2. Tingkat <i>turn over</i> Bank BTN selama masa pandemi mengalami penurunan, dimana pada tahun 2020 rasio <i>turn over</i> mencapai 2,23%, angka ini menurun menjadi 1,18% pada tahun 2021. Beberapa program retensi yang dilakukan Perseroan antara lain: - Jaminan fasilitas kesehatan masa pandemi yang diberikan Perseroan. - Tidak ada penurunan remunerasi oleh Perseroan.
2	Bank BTN dapat mempertimbangkan penerapan pedoman ISO 37000:2021 tentang Governansi Organisasi (<i>Governance of Organization</i>).	Melakukan <i>Review</i> dan kajian atas ISO 37000:2021 tentang Governansi Organisasi khususnya pada: 1) Aspek-aspek yang harus dipersiapkan. 2) Tahapan-tahapan yang harus dijalankan. 3) Potensi dan peluang untuk implementasi pada tahun 2023.

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut Perseroan
3	Bank BTN perlu mengoptimalkan tata kelola data (data governance) untuk mendukung keamanan data serta memberikan nilai tambah yang berkelanjutan bagi perusahaan.	- Perseroan mengacu pada ketentuan internal nomor KK.9-M tanggal 28 februari 2023 tentang Tata Kelola Data yang me-refer pendekatan DAMA-DMBOK. - Perseroan melakukan inisiatif tentang pengelolaan tata kelola data pada tahun 2023 sebagai berikut: <i>Corporate Plan</i> - Pengembangan <i>Enterprise Data Warehouse</i> (EDW) - Pengembangan <i>Master Data Management</i> (MDM) <i>Non-Corporate Plan</i> - Pengembangan Data Platform - Pengembangan data <i>visualization</i> - Pengembangan model untuk <i>customer lifecycle</i> - Melakukan strategi perlindungan data khususnya Pengendalian akses data atau permintaan data. - IT Security Division sudah menjalankan strategi pengamanan data melalui aspek <i>People</i>, <i>Process</i> dan <i>Technology</i> yang meliputi antara lain: - Menjalankan IT <i>Security Awareness</i> yang dilakukan setiap bulan. - Pembaruan Kebijakan Khusus tentang Keamanan Teknologi Informasi yang disesuaikan dengan standar ISO 27001 tentang Manajemen Sistem Keamanan Informasi dan SEOJK Nomor 29/SEOJK.03/2022 tentang Ketahanan dan Keamanan Siber bagi Bank Umum. - Implementasi teknologi <i>Data Loss Prevention</i> (DLP) yang bertujuan untuk melindungi atau membatasi data dengan klasifikasi <i>restricted confidential</i> internal keluar Bank BTN seperti data <i>Personally identifiable information</i> (PII) dan <i>Personal Card Information</i> (PCI).
4	Bank BTN perlu mengoptimalkan penerapan konsep ESG (<i>Environmental, Social, and Governance</i>) yang terintegrasi di seluruh lini bisnis dan dievaluasi sehingga memberikan nilai tambah yang berkelanjutan.	- Implementasi konsep ESG di seluruh lini bisnis Perseroan melalui penyusunan roadmap dan framework ESG BTN 2023-2028. - Menetapkan rating ESG sebagai KPI Direksi tahun 2023. - Melakukan peringatan dan perbaikan implementasi ESG Perseroan melalui kerjasama dengan lembaga rating ESG.
5	Bank BTN perlu mengoptimalkan penerapan manajemen risiko dan pengendalian internal dalam pelaporan keuangan diantaranya melalui implementasi ICoFR (<i>Internal Control Over Financial Reporting</i>) yang disesuaikan dengan tujuan, sasaran dan strategi perusahaan.	Melakukan kajian implementasi ICoFR lebih lanjut dengan Divisi-divisi terkait.
6	Bank BTN dapat mengoptimalkan sistem dan mekanisme pelaporan dan pelanggaran (<i>whistle blowing system/ WBS</i>) dengan mempertimbangkan untuk melakukan adopsi atau menerapkan standar ISO 37002:2021 tentang Sistem Manajemen Pelaporan Pelanggaran (<i>Whistle blowing Management System</i>).	Perseroan telah mengimplementasikan WBS secara independen yaitu pengelolaan WBS dilakukan oleh pihak ketiga.
7	Perseroan akan melakukan <i>self assessment</i> terhadap manajemen pengetahuan / <i>knowledge management</i> dan kedepannya akan mengimplementasikan ISO 30401:2018 tentang manajemen pengetahuan.	Perseroan akan melakukan <i>self assessment</i> terhadap manajemen pengetahuan / <i>knowledge management</i> dan kedepannya akan mengimplementasikan ISO 30401:2018 tentang manajemen pengetahuan.
Governance Outcome		
1	Bank BTN perlu menumbuhkan budaya tangguh dengan kemampuan untuk cepat beradaptasi dan merespon perubahan serta mengelola tantangan agar dapat menjadi peluang untuk bersaing.	- Pelaksanaan <i>Innovation Awards</i> 2022 telah dilaksanakan dengan mengusung tema <i>Expand to New Business Area</i> yang sejalan dengan langkah Perusahaan untuk merespon perubahan bisnis (transformasi). Hasil <i>Innovation Awards</i> dikoordinasikan dengan IT untuk dapat diimplementasikan. - Perseroan telah memiliki program budaya AKHLAK dimana salah satunya yaitu <i>core value</i> Adaptif yang diimplementasikan melalui penyelenggaraan kegiatan <i>Innovation Awards</i> secara rutin tahunan dengan mengambil fokus tema sesuai dengan <i>corporate plan</i>. - Pelaksanaan <i>Innovation Awards</i> tahun 2023 akan dilaksanakan sesuai dengan 14 tema fokus manajemen tahun 2023. - Transformasi organisasi dijalankan sesuai dengan rencana bisnis perusahaan yang meliputi sentralisasi <i>accounting</i>, sentralisasi <i>procurement</i>, sentralisasi <i>operation</i> dan <i>branch transformation</i>. - Bank BTN juga pada tahun 2023 merencanakan sentralisasi SME dengan melakukan <i>clustering fungsi risk</i> untuk mendukung bisnis SME.

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut Perseroan
2	Bank BTN perlu melakukan penilaian kembali untuk melihat pencapaian kinerja berdasarkan kriteria <i>Baldrige Excellence Framework</i> .	Asesmen Implementasi KPKU terakhir dilakukan pada tahun 2019 berdasarkan Surat Kementerian BUMN No.S-198/D7.MBU/10/2017 tanggal 07 Oktober 2017. Untuk pelaksanaan Asesmen Implementasi KPKU tahun berikutnya belum ada arahan dari Kementerian BUMN.
3	Bank BTN perlu mengoptimalkan penerapan dari kebijakan, strategi dan program peningkatan kapabilitas digital perusahaan yang dapat mendukung pengembangan bisnis yang efisien dan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan, serta menjadikan perusahaan bagian utama dalam ekosistem Lembaga Keuangan digital.	a. Perseroan sudah memiliki Kebijakan Umum No KU.5 tentang Teknologi Informasi, Manajemen Data, dan Digital yang berlaku sejak tanggal 23 Desember 2022. b. Bank BTN telah menyusun RSTI 2021-2025 dimana untuk tahun 2023 akan dikembangkan beberapa aplikasi seperti pengembangan digital New Mobile Banking Konvensional dan Syariah, <i>Internet Banking Cosumer</i> dan Bisnis, BTN Properti, dan pengembangan Fitur POS/EDC dan SmartKiosk.
4	Bank BTN perlu mengoptimalkan penerapan budaya risiko yang menyeluruh sehingga dapat menjadi fondasi yang kuat untuk dapat mengoptimalkan potensi dan meraih kinerja yang lebih baik serta pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.	a. Melakukan <i>assessment risk maturity</i> untuk mengetahui tingkat pengelolaan dan pemahaman risiko. b. Melakukan internalisasi terkait sistem <i>Operasional Risk Management Information System (ORMIS)</i> yang terdiri dari (RCSA, LED, KRI) pada masing-masing unit kerja yang saat ini telah mulai dilakukan pada Kantor Wilayah dan Kantor Cabang di Wilayah. c. Mengoptimalkan fungsi <i>change agent</i> pada unit bisnis, Kantor Wilayah dan Kantor Cabang.

Penilaian GCG Berdasarkan ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS)

Assessment GCG lainnya yang dilakukan Perseroan adalah ASEAN Corporate Governance Scorecard yang merupakan parameter pengukuran praktik tata kelola yang disepakati oleh ASEAN Capital Market Forum (ACMF). ACGS merupakan inisiatif dari negara-negara ASEAN yang tergabung dalam ACMF untuk mendukung praktik tata kelola perusahaan dengan tujuan untuk mempromosikan ASEAN sebagai aset berkelas dan meningkatkan kepercayaan investor global atas kualitas perusahaan di regional ASEAN.

Kriteria Penilaian

Penilaian ACGS memiliki 5 (lima) aspek yang dikelompokkan dalam 2 Level sebagai berikut:

1. Level 1, terdiri dari 5 Part yaitu:
 - Part A: *Rights of Shareholders*
 - Part B: *Equitable Treatment of Shareholders*
 - Part C: *Role of Stakeholders*
 - Part D: *Disclosure and Transparency*
 - Part E: *Responsibility of the Board*
2. Level 2, terdiri dari Bonus dan Penalti.

Pihak yang Melakukan Assessment

Masing-masing negara ASEAN menunjuk perwakilan *Domestic Ranking Body (DRB)* dan *Corporate Governance (CG) Expert* untuk melakukan penilaian/assessment berdasarkan parameter ACGS. Dalam hal ini perwakilan DRB dan CG Expert dari Indonesia diwakili oleh PT RSM Indonesia.

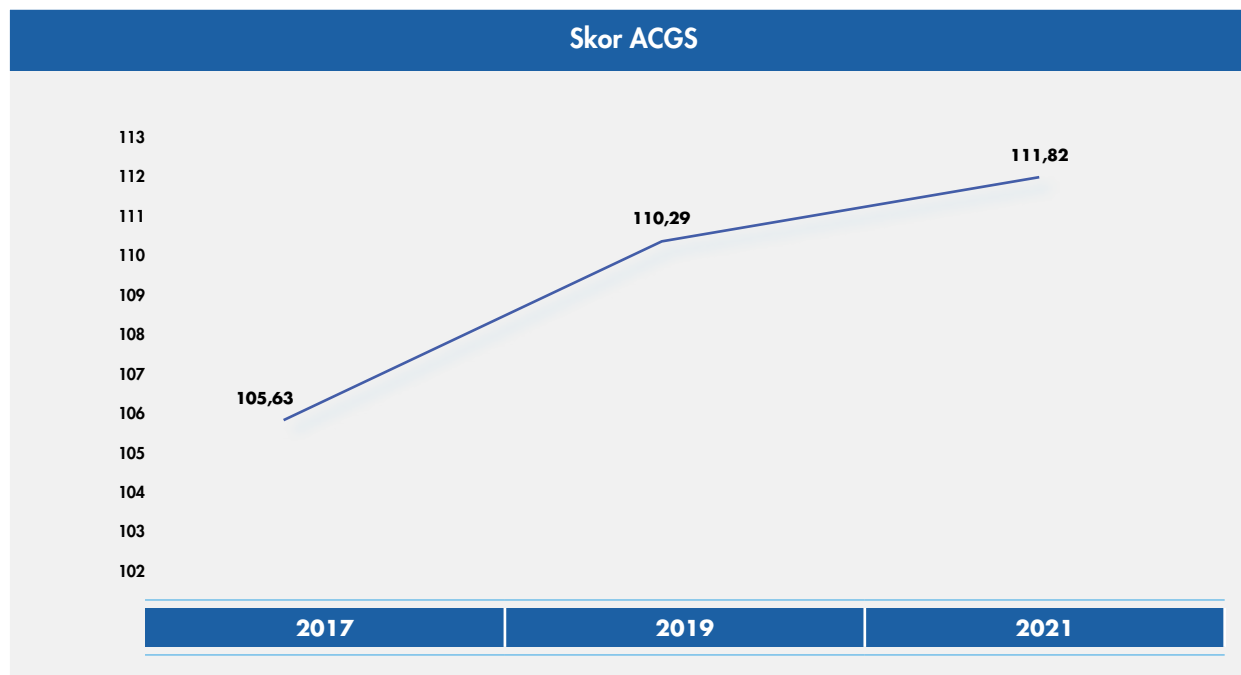
Skor Penilaian

Atas hasil penilaian 100 perusahaan tercatat berdasarkan kriteria ACGS yang dilaksanakan oleh perwakilan CG Expert dan DRB Indonesia (PT RSM Indonesia) tahun 2022 dan hasilnya diumumkan pada tanggal 1 Desember 2022, Bank BTN berhasil memperoleh penghargaan pada 2 kategori yaitu “Top 3 Indonesian PLCs” dan 10 (sepuluh) Perusahaan tercatat di Indonesia yang masuk dalam kategori “ASEAN Asset Class Thresholds”.

Hasil penilaian ASEAN Asset Class tahun 2021 yaitu untuk tahun buku 2020, terdapat 10 Perusahaan Tercatat Indonesia yang masuk dalam daftar ASEAN Asset Class dengan nilai 97,5 ke atas.

Terdapat 3 (tiga) Perusahaan Tercatat yang mendapat skor ACGS tertinggi (*Top 3 Indonesia PLCs*) yang salah satunya adalah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Di samping itu, Perseroan juga memperoleh penghargaan sebagai Perusahaan Tercatat yang masuk dalam kategori ASEAN Asset Class. Berdasarkan laporan penilaian ACGS yang disampaikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI), total skor Perseroan berdasarkan parameter ACGS tahun 2021 adalah sebesar 111,82. Hasil skor tersebut meningkat dari skor Perseroan pada ajang ACGS tahun 2019 yang diselenggarakan oleh ACMF dengan peningkatan skor sebesar 1,53 poin. Penilaian tersebut di review berdasarkan pengungkapan praktik tata kelola Perseroan melalui informasi yang tersedia di publik dan dapat diakses oleh masyarakat umum, serta mencakup informasi yang dimuat dalam laporan tahunan, *website*, pengumuman dan edaran yang dibuat oleh Perseroan. Informasi yang digunakan dalam penilaian adalah informasi yang disajikan dalam Bahasa Inggris dengan *cut-off date* 31 Agustus 2021. Berdasarkan hasil penilaian ASEAN Asset Class tahun 2021, Perseroan berhasil ditetapkan sebagai perusahaan *Top 3 of Indonesian PLCs* dan ASEAN Asset Class.

Dalam 3 (tiga) periode tahun terakhir, skor ACGS Bank BTN adalah sebagai berikut:



Hal ini menunjukkan bahwa implementasi pelaksanaan GCG di Bank BTN semakin baik dari tahun ke tahun.

Level/ No. Item	Corporate Governance Standard Criteria	Status	GAP
Level 1			
A.1	Hak Dasar Pemegang Saham.	Comply	
A.2	Hak untuk berpartisipasi dalam keputusan mengenai perubahan perusahaan yang fundamental	Comply	
A.3	Hak untuk berpartisipasi secara efektif dan menggunakan suara dalam RUPS serta hak untuk mendapatkan informasi mengenai aturan-aturan yang berlaku dalam RUPS.	Comply	Perseroan belum mengungkapkan penggunaan pihak independen (pengamat) untuk melakukan/memvalidasi perhitungan suara dalam RUPS.
A.4	Pasar untuk pengendalian perusahaan harus diizinkan agar berfungsi secara efisien dan transparan	Comply	
A.5	Pelaksanaan hak-hak kepemilikan oleh seluruh pemegang saham, termasuk investor kelembagaan, harus difasilitasi.	Comply	
B.1	Hak suara dan kepemilikan saham	Comply	
B.2	Pemberitahuan RUPS	-	a. Pengungkapan profil calon Dewan Komisaris dan Direksi belum tersedia pada Pemanggilan RUPS; b. Pemanggilan RUPS tidak memuat informasi terkait Auditor Eksternal yang akan ditunjuk pada RUPS.
B.3	Mencegah perdagangan orang dalam dan penyalahgunaan untuk kepentingan pribadi.	Comply	
B.4	Transaksi pihak berelasi yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dan Direksi.	Comply	

Level/ No. Item	Corporate Governance Standart Criteria	Status	GAP
B.5	Melindungi pemegang saham minoritas dari tindakan pelanggaran	Comply	
C.1	Hak-hak pemangku kepentingan yang ditetapkan oleh hukum atau melalui perjanjian bersama harus dihormati.	Comply	
C.2	Kepentingan pemangku kepentingan dilindungi oleh hukum, pemangku kepentingan harus mendapatkan ganti rugi efektif untuk setiap pelanggaran atas hak-hak mereka.	Comply	
C.3	Mengembangkan mekanisme peningkatan kinerja untuk karyawan.	Comply	
C.4	Pemangku kepentingan termasuk karyawan individu dan badan perwakilan mereka, harus dapat berkomunikasi secara bebas atas perhatian mereka tentang praktik ilegal atau tindakan tidak etis kepada Dewan Komisaris dan hak-hak mereka tidak boleh dikompromikan dalam melakukan hal ini.	Comply	
D.1	Transparansi Struktur Kepemilikan	Comply	
D.2	Kualitas Laporan Tahunan	-	Perseroan belum mengungkap remunerasi setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris
D.3	Pengungkapan atas Transaksi Pihak Berelasi	Comply	
D.4	Hubungan Direktur dan Dewan Komisaris dalam Saham Perusahaan	Comply	
D.5	Auditor Eksternal dan Laporan Auditor	Comply	
D.6	Media Komunikasi	Comply	
D.7	Pengajuan Tepat Waktu/Penerbitan Laporan Tahunan/Keuangan	Comply	
D.8	Situs Perseroan	Comply	
D.9	Hubungan Investor	Comply	
E.1	Tugas dan Tanggung Jawab Dewan	Comply	
E.2	Struktur Dewan	Comply	Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tidak seluruhnya merupakan komisaris independen
E.3	Proses Dewan	Comply	
E.4	Posisi Dewan	Comply	
E.5	Kinerja Dewan	Comply	

Selanjutnya Perseroan juga sedang melakukan persiapan untuk penilaian ACGS tahun 2024 untuk tahun buku 2023 berdasarkan kriteria dan parameter baru yang menggunakan ACGS 2023 (*revised* Oktober 2023).

Rekomendasi dan Tindaklanjutnya

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Perusahaan mempublikasikan hasil pemungutan suara seluruh keputusan pada RUPST/RUPSLB yang terakhir di satu hari kerja setelah RUPS tersebut dilaksanakan	Perseroan mempublikasikan hasil pemungutan suara seluruh keputusan pada RUPST/RUPSLB yang terakhir di satu hari kerja setelah RUPS
2	Perusahaan mengungkapkan total remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris.	Perseroan memastikan mengungkapkan remunerasi masing-masing anggota Dewan Komisaris. Remunerasi harus mencakup hal-hal berikut: 1. Biaya 2. Tunjangan 3. Gaji lainnya (termasuk tunjangan dalam bentuk natura)
3	Perusahaan mengungkapkan proses dan kriteria penilaian kinerja tahunan individu Direktur dan Komisaris.	Perseroan telah mengungkapkan proses & kriteria penilaian kinerja tahunan individu Direktur dan Komisaris, namun tidak disertai dengan hasil penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi.

Penilaian GCG Berdasarkan Top GRC 2023

Perseroan mengikuti ajang TOP GRC 2023 yaitu kegiatan *corporate rating (award)* tahunan dari Majalah Top Business pada bidang Tata Kelola Perusahaan, Manajemen Risiko dan Manajemen Kepatuhan. Tujuan dari penyelenggaraan TOP GRC adalah untuk mendorong peningkatan bisnis perusahaan melalui pengembangan kebijakan dan implementasi GRC Terintegrasi. Tema TOP GRC 2023 adalah *"Building Resilient Future Through ESG & GRC"*. Dalam penyelenggaraan penghargaan TOP GRC 2023 ini Majalah Top Business bekerjasama dengan Asosiasi GRC Indonesia, IRMAPA (*Indonesia Risk Management Professional Association*), ICoPI (*Institute Compliance Professional Indonesia*), dan PaGi (Perkumpulan Profesional Governansi Indonesia), serta didukung oleh beberapa perusahaan konsultan GCG dan *Risk Management*. Adapun tahapan yang telah dilakukan diantaranya:

- a. Pelaksanaan tahapan wawancara dan tanya jawab yang dilakukan oleh Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Juri Top GRC 2023 pada tanggal 6 Juli 2023.
- b. Pada tanggal 6 September 2023 telah dilaksanakan acara penghargaan TOP GRC 2023, Bank BTN berhasil mendapatkan penghargaan diantaranya:
 - 1) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai #5 Stars, yaitu Sistem, infrastruktur, dan implementasi yang terkait dengan Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG), Manajemen Risiko, dan Manajemen Kepatuhan, serta pemanfaatan teknologi digital di perusahaannya, berada di level yang Sangat Ekselen (Luar Biasa), sehingga sangat mendukung keberhasilan implementasi GRC dan peningkatan kinerja bisnis Perusahaan yang berkelanjutan.
 - 2) Bpk. Nixon L.P. Napitupulu (Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk) sebagai *The Most Committed GRC Leader 2023*. Penghargaan ini diberikan kepada *Business Leader* atau Presiden Direktur/ Pimpinan Tertinggi di perusahaan yang dinilai memiliki komitmen tinggi dalam mendukung kelengkapan sistem dan infrastruktur serta keberhasilan implementasi GRC di Perusahaan.
 - 3) Dewan Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai *The High Performing Board of Commissioners on GRC 2023* yaitu Penghargaan kepada Dewan Komisaris perusahaan, yang dinilai memiliki komitmen tinggi dalam mendukung kelengkapan sistem dan infrastruktur serta keberhasilan implementasi GRC di Perusahaan.

Penilaian GCG Berdasarkan GRC & Performance Excellence

Perseroan juga mengikuti ajang *GRC & Performance Excellence 2023* ini adalah kegiatan *corporate rating (award)* tahunan, di bidang Tata kelola perusahaan (GCG), Manajemen Risiko, dan Manajemen Kepatuhan. Tujuan program ini adalah untuk mendorong peningkatan bisnis perusahaan melalui pengembangan kebijakan dan implementasi tata kelola perusahaan, manajemen risiko, dan kepatuhan terhadap regulasi secara terintegrasi. Adapun tahapan yang telah dilakukan diantaranya:

- a. Pelaksanaan tahapan wawancara dan tanya jawab yang dilakukan oleh Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Juri *GRC & Performance Excellence 2023* pada tanggal 6 Juli 2023.
- b. Pada tanggal 30 September 2023 telah dilaksanakan acara penghargaan *GRC and Performance Excellence 2023*, Bank BTN berhasil mendapatkan penghargaan diantaranya:
 - 1) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai *The Greatest Champions of GRC Excellence Performance 2023 (Banking Industries)*.
 - 2) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sebagai *The Best GRC For IT/Digital Transformation 2023 (Banking Industries)*.
 - 3) Bapak Nixon L.P. Napitupulu sebagai *The Best CEO For GRC Excellence 2023 (Banking Industries)*.
 - 4) Bapak Eko Waluyo sebagai *The Best Chief Compliance Officer 2023 (Banking Industries)*.

ASEAN CG SCORECARD DARI INDOONESIAN INSTITUTE FOR CORPORATE DIRECTOR (IICD) 2023

ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) dilaksanakan dalam rangka mendukung upaya untuk meningkatkan kepercayaan investor atas kualitas perusahaan di region ASEAN melalui peningkatan standar dan praktik tata kelola. ACGS diikuti oleh partisipan dari semua yurisdiksi ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Manfaat dan Tujuan *ASEAN CG Scorecard* adalah:

- a. Perlunya suatu referensi yang dapat digunakan sebagai acuan dalam mempersiapkan strategi yang efektif dalam rangka melakukan upaya perbaikan terhadap kinerja praktik GCG ke depan.
- b. Meningkatkan standar dan praktek *corporate governance* perusahaan-perusahaan terbuka di ASEAN.
- c. Meningkatkan daya tarik investasi global terhadap perusahaan terbuka dengan *governance* baik di ASEAN.

Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh *Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD)*, Bank BTN berhasil memperoleh kategori:

- a. TOP 50 Emiten Kapitalisasi Pasar Terbesar (BigCap PLCs) dengan Praktek Tata Kelola Perusahaan Terbaik.
- b. *The Best Financial Sector 2023*.



PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN



Perseroan senantiasa berkomitmen pada penerapan Pembangunan Berkelanjutan. Dengan komitmen tersebut, pada tahun 2023 Perseroan berhasil menyalurkan sebesar Rp79,99 miliar, melalui berbagai kegiatan dalam Program TJSL.

Sepanjang tahun 2023, Perseroan berhasil menerapkan strategi dan inisiatif yang tepat sehingga Perseroan berhasil membukukan pencapaian secara positif dan berkelanjutan. Sampai dengan Desember 2023, Perseroan berhasil menyalurkan dana TJSL 2023 sebesar **Rp79,99 miliar**, melalui berbagai kegiatan yang dilaksanakan dalam Program TJSL mendukung Perseroan untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) BUMN, adalah kegiatan yang merupakan komitmen Perseroan terhadap pembangunan yang berkelanjutan dengan memberikan manfaat pada ekonomi, sosial, lingkungan serta hukum dan tata kelola dengan prinsip yang lebih terintegrasi, terarah, terukur dampaknya serta dapat dipertanggungjawabkan dan merupakan bagian dari pendekatan bisnis Perseroan. Sebagai salah satu bank terbesar di KPR dan sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Perseroan berkomitmen untuk mendukung terwujudnya pembangunan berkelanjutan. Dukungan nyata diberikan Perseroan dengan memberikan pembiayaan secara selektif, yang selaras dengan Prinsip Keuangan Berkelanjutan (*Sustainable Finance*).

Perseroan terus memperkuat komitmennya terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan melalui integrasi dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) dan pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Sebagai bentuk implementasi dari Peraturan Menteri BUMN PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, Perseroan telah menyusun inisiatif-inisiatif yang terfokus pada tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan dan kepedulian terhadap lingkungan.

Kementerian BUMN mendorong semua korporasi di bawahnya agar Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) BUMN dapat memberikan dampak kepada masyarakat serta sebagai wujud dukungan terhadap program Pemerintah yang difokuskan kepada 3 (tiga) bidang prioritas yaitu Pendidikan, Lingkungan, Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Pelaksanaan Program TJSL BUMN menerapkan prinsip terintegrasi, terarah, terukur dampaknya serta akuntabel.

Penyelenggaraan Program TJSL Perseroan bertujuan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan berkelanjutan, memberikan dukungan terhadap keberhasilan bisnis dalam jangka panjang, serta memenuhi harapan pemangku kepentingan terhadap Perseroan. Perseroan memaknai substansi program TJSL tidak hanya mengarah kepada upaya membangun hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan dengan lingkungan, komunitas, dan pemangku kepentingan - baik secara lokal, nasional maupun global - namun juga mengarah kepada misi Perseroan untuk memberikan dampak dan kontribusi positif bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Perseroan memiliki

tugas moral untuk mengembangkan bisnis dan memajukan perekonomian dalam negeri yang berkelanjutan dengan senantiasa berpegang teguh pada nilai integritas, mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menjunjung tinggi etika bisnis. Program TJSL pada tahun 2023 difokuskan pada pilar-pilar utama berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, yaitu sosial, lingkungan, ekonomi, serta hukum dan tata kelola.

Program TJSL BUMN dilaksanakan berdasarkan pilar utama:

1. Sosial, untuk tercapainya pemenuhan hak dasar manusia yang berkualitas secara adil dan setara untuk meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.
2. Lingkungan, untuk pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan sebagai penyangga seluruh kehidupan.
3. Ekonomi, untuk tercapainya pertumbuhan ekonomi berkualitas melalui keberlanjutan peluang kerja dan usaha, inovasi, industri inklusif, infrastruktur memadai, energi bersih yang terjangkau dan didukung kemitraan.
4. Hukum dan tata kelola, untuk terwujudnya kepastian hukum dan tata kelola yang efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif untuk menciptakan stabilitas keamanan dan mencapai negara berdasarkan hukum.

Dalam pelaksanaannya Program TJSL BUMN dilaksanakan dengan menerapkan prinsip:

1. Terintegrasi, yaitu berdasarkan analisa risiko dan proses bisnis yang memiliki keterkaitan dengan pemangku kepentingan.
2. Terarah, yaitu memiliki arah yang jelas untuk mencapai tujuan perusahaan.
3. Terukur dampaknya, yaitu memiliki kontribusi dan memberikan manfaat yang menghasilkan perubahan atau nilai tambah bagi pemangku kepentingan dan perusahaan.
4. Akuntabilitas, yaitu dapat dipertanggungjawabkan sehingga menjauhkan dari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan.

Program TJSL saat ini adalah bukan lagi *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang bersifat *charity* atau *philanthropy* tapi harus memiliki nilai tambah atau disebut *Creating Shared Value* (CSV). CSV yaitu kegiatan TJSL yang memberikan nilai tambah bagi penerima dan berkelanjutan serta memberikan *benefit* kepada Perseroan yang mengacu pada Pilar dan Fokus TJSL.

Perbedaan Program CSR dengan TJSL Creating Shared Value (CSV)

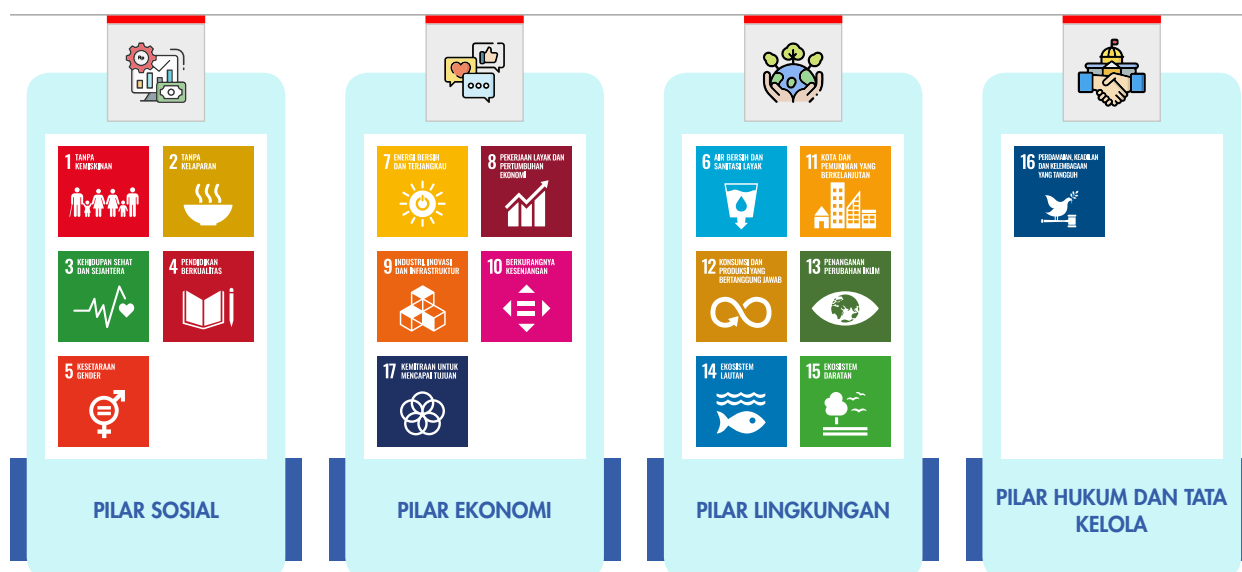
	CSR	TJSL (CSV)
Filosofi	Bantuan yang bersifat murni bantuan sosial (<i>charity, philanthropy</i>)	Bantuan sosial yang memberikan/menciptakan nilai ekonomi bagi penerima dan perusahaan
Value	Berbuat baik, tanpa imbal balik bagi perusahaan	- Memberikan solusi pada masalah sosial, memberikan manfaat ekonomi berkelanjutan kepada masyarakat - Perseroan mendapatkan <i>impact</i> dari bantuan sosial
Hasil	Manfaat hanya untuk penerima dan tidak berkelanjutan	Secara sosial, ekonomi dan lingkungan berdampak kepada masyarakat dan terkait dengan bisnis perusahaan yang berkelanjutan

Komitmen Perseroan pada Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan —

Perseroan memandang penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) sebagai sebuah bentuk pertanggungjawaban akan keberadaan Perseroan kepada seluruh pemangku kepentingan. Perseroan melaksanakan berbagai kegiatan dalam Program TJSL yang sesuai dan relevan dengan bidang usaha dan kegiatan Perseroan dengan sebaik-baiknya. Pelaksanaan program TJSL ini dilakukan sebagai bentuk peran serta Perseroan dalam upaya perbaikan tingkat perekonomian masyarakat, sekaligus sebagai bagian dari kontribusi bagi pembangunan berkelanjutan.

Perseroan memberikan dukungan dan kontribusi terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), yaitu pembangunan yang mengedepankan keselarasan antara aspek ekonomi, sosial dan lingkungan hidup. Dengan dukungan dan kontribusi tersebut, Perseroan percaya telah membangun fondasi berkelanjutan dengan menciptakan nilai jangka panjang (*longterm value creation*) yang tidak hanya dalam bentuk terciptanya keunggulan bersaing (*sustainable competitive advantage*) secara berkelanjutan bagi Perseroan, melainkan juga untuk masyarakat dan lingkungan yang lebih luas dan tentu saja memperkuat daya tahan (*strengthen resilience*).

Pemetaan Pilar, Fokus, Jenis Program dan Manfaat TJSL



Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia. Komitmen Indonesia untuk mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ditetapkan melalui Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 yang mengatur tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. TPB berisi 17

tujuan dan 169 target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. Perseroan menyadari akan kewajibannya untuk ikut serta dalam pencapaian TPB, terutama pada poin ke-11 yaitu membangun kota dan pemukiman yang layak, aman dan terjangkau bagi semua orang pada tahun 2030 melalui produk pembiayaan kepemilikan rumah (KPR) bagi masyarakat.

Komite Program *Environmental, Social and Governance* (ESG) dan Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan (TJSL) —

Dalam mengusulkan kerangka kerja (*framework*), strategi, dan peta jalan (*roadmap*) ESG ini, Perseroan juga memperhatikan keterlibatan *stakeholder* antara lain melakukan *benchmarking* dengan perusahaan yang telah menjalankan ESG baik dalam negeri maupun luar negeri dan melaksanakan ESG *Workshop* dengan peserta internal yang terdiri dari 20 divisi, yang bertujuan sebagai *supporting validator* terhadap usulan *draft ESG framework*, strategi dan inisiatif, sehingga membentuk kerangka kerja ESG yang sesuai dengan kesiapan dan ambisi Perseroan.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite ESG

Komite *Environmental, Social and Governance* (ESG) yang dibentuk untuk mencapai *Sustainable Development Goals* dan target *Climate*, berperan dalam memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama untuk merumuskan kebijakan, strategi dan sasaran program ESG dan TJSL yang berdampak terhadap lingkungan, sosial dan tata kelola serta sarana dalam melakukan monitoring dan pengambilan keputusan terkait pelaksanaan program ESG dan TJSL Perseroan.

Tugas Komite ESG adalah melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama terkait ESG antara lain:

1. Keputusan atas strategi Bank yang berdampak terhadap lingkungan, sosial dan tata kelola dalam program dan *roadmap* ESG.
2. Monitoring atas implementasi strategi dan *roadmap* ESG Bank.
3. Memberikan informasi kepada manajemen Perseroan mengenai isu terkait ESG termasuk perundang-undangan, program pemerintah, perkembangan internasional, tren bisnis ke depan dan perubahan iklim.
4. Memantau, evaluasi dan memberikan rekomendasi terhadap hasil laporan ESG, *investor concern* atau pihak ketiga lainnya terhadap implementasi ESG.

Struktur Keanggotaan

Komite ESG diatur dalam Kebijakan Khusus No. KK.9 - D tentang Prosedur Tata Kelola Komite Direksi memiliki susunan sebagai berikut:

STRUKTUR	JABATAN
Ketua (merangkap anggota tetap)	Direktur Utama
Direksi (merangkap anggota tetap)	Wakil Direktur Utama *) Direktur yang membawahi Manajemen Risiko **) Direktur yang membawahi Human Capital, Kepatuhan & Hukum Direktur yang membawahi Assets Management Direktur yang membawahi Keuangan
Direksi/SEVP	SEVP <i>Wholesale Banking</i> (Anggota Tetap) Direktur/SEVP lain sesuai materi pembahasan (Anggota Tidak Tetap) SEVP yang membawahi <i>Compliance and Legal</i> (Anggota Tidak Tetap)

*) Ketua Pengganti I

**) Ketua Pengganti II

Kondisi Umum Penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan —

Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) merupakan program yang diamanatkan oleh Pemerintah kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). TJSL dilatarbelakangi oleh masalah lingkungan dan sosial yang muncul sebagai dampak dari pembangunan yang pesat dalam mengejar pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, diperlukan peran dari Lembaga Keuangan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan tanpa merusak lingkungan dan sosial. TJSL dipandang sebagai wujud nyata kontribusi perusahaan terhadap upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, dengan memberikan manfaat pada ekonomi, sosial, lingkungan serta hukum dan tata kelola dengan prinsip yang lebih terintegrasi, terarah, terukur dampaknya serta dapat dipertanggungjawabkan. Bagi Perseroan, TJSL memberikan arahan strategis dalam mengembangkan portofolio pembiayaan untuk kegiatan usaha berkelanjutan serta perubahan-perubahan yang akan dilakukan Perseroan dalam proses bisnis dan manajemen risiko. Perubahan yang dicapai merupakan perubahan yang relevan dalam rangka mengintegrasikan pengelolaan risiko *Environmental, Social, Governance* (ESG) dalam kegiatan usaha Perseroan.

Pada tahun 2023 Bank BTN telah melaksanakan beberapa kegiatan TJSL dengan berbagai jenis kegiatan yang mengacu pada 4 (empat) Pilar TJSL yaitu Pilar Sosial, Pilar Ekonomi, Pilar Lingkungan dan Pilar Tata Kelola serta 3 (tiga) Fokus yaitu Fokus Pendidikan, Fokus Lingkungan (*Go Green*) serta Fokus Pembinaan UMKM. Berdasarkan hasil *alignment* antara 4 (empat) Pilar TJSL dengan 3 (tiga) fokus kegiatan TJSL, Bank BTN mengategorikan kegiatan program TJSL menjadi sebagai berikut:

1. Program TJSL Unggulan.
2. Program TJSL *Creating Shared Value* (CSV).
3. Program TJSL Kolaborasi.

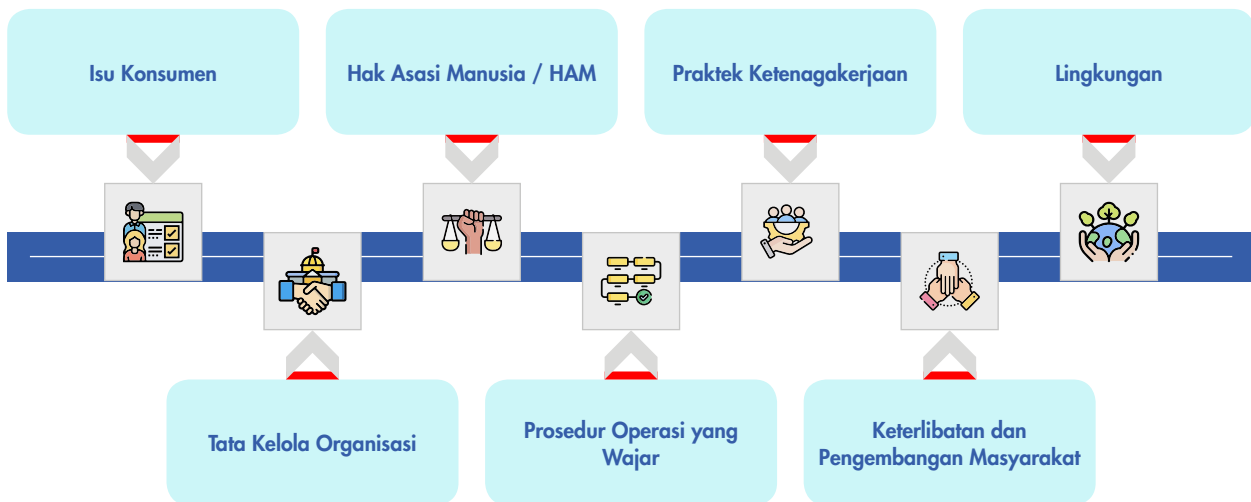
Ketiga program tersebut bertujuan untuk menjaga *business continuity, pure social and environment, branding and reputation*. Perseroan memaknai substansi program TJSL tidak hanya mengarah kepada upaya membangun hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan dengan lingkungan, komunitas dan pemangku kepentingan—baik secara lokal, nasional maupun global, namun juga mengarah kepada misi Perseroan untuk memberikan dampak dan kontribusi positif bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.



Perseroan berkomitmen untuk memenuhi tanggung jawab ini dengan terus menjalankan proses bisnis yang sehat serta meningkatkan program dan kegiatan yang berkaitan dengan TJSL. Berbagai aktivitas yang dijalankan sekaligus merefleksikan kontribusi Perseroan pada tujuan pembangunan berkelanjutan yang pelaksanaannya didasarkan pada prinsip standar ISO

26000. Dengan demikian, penerapan program TJSL yang dijalankan Perseroan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembangunan sosial dan pembangunan lingkungan, berkontribusi pada penciptaan nilai tambah bagi Perseroan serta membina usaha mikro dan usaha kecil masyarakat agar lebih tangguh dan mandiri.

7 Prinsip Standar ISO 26000



Pelaksanaan Program TJSL berorientasi pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) serta berpedoman kepada ISO 26000 sebagai panduan pelaksanaan program, dengan harapan pelaksanaan Program TJSL BUMN yang lebih terukur, berdampak dan berkelanjutan. Program TJSL Perseroan bertujuan untuk:

1. Memberikan kemanfaatan bagi pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, pembangunan lingkungan serta pembangunan hukum dan tata kelola bagi Perseroan;
2. Berkontribusi pada penciptaan nilai tambah bagi perusahaan dengan prinsip yang terintegrasi, terarah dan terukur dampaknya serta akuntabel;
3. Membina usaha mikro dan usaha kecil agar lebih tangguh dan mandiri serta masyarakat sekitar Perseroan.

Selanjutnya, Perseroan juga telah menetapkan tujuan strategis yang dituangkan dalam beberapa tujuan yang memiliki nilai-nilai manfaat, keberlanjutan dan mendukung kelancaran operasional Perseroan. Penetapan tujuan ini juga didasarkan pada konsep keseimbangan *people, planet* dan *profit*.

Perseroan terus berkomitmen dalam mendorong keuangan berkelanjutan melalui integrasi aspek *Environmental, Social and Governance* (ESG) dalam kegiatan operasionalnya. Perjalanan Perseroan dalam ranah ESG melibatkan perencanaan tentang bagaimana Perseroan mengelola dampak lingkungan, menangani isu-isu sosial, dan mempertahankan standar tata kelola yang etis dalam setiap operasi perbankannya. Penerapan keuangan berkelanjutan Perseroan telah dilakukan sejak tahun 2019 melalui penerbitan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) yang mengacu pada POJK No. 51 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Berkelanjutan Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.

Perseroan sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan salah satu bank terbesar di Indonesia berkomitmen untuk mendukung terwujudnya pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut diwujudkan oleh Perseroan dengan memberikan pembiayaan secara selektif, yang selaras dengan prinsip keuangan berkelanjutan (*sustainable finance*) serta pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang berkelanjutan.

Program TJSL yang mendukung Keuangan Berkelanjutan di antaranya adalah:

No.	Nama Program	Satuan Kerja Pelaksana Program
1.	Merdeka Belajar berupa penyediaan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini dan rehabilitasi ruang belajar.	Corporate Secretary
2.	Penyediaan air bersih dan sanitasi sehat berbasis masyarakat.	Corporate Secretary
3.	Penyediaan sarana dan prasarana untuk UMKM.	Corporate Secretary
4.	Pemberian beasiswa kepada pelajar (tingkat SD-SMA/Sederajat) dan mahasiswa dari keluarga tidak mampu.	Corporate Secretary
5.	Pendidikan dan pelatihan kepada pengembang (<i>developer</i>) muda, bekerja sama dengan <i>Housing Finance Center</i> (HFC).	Corporate Secretary
6.	Penghijauan di perumahan yang dibiayai Bank BTN.	Corporate Secretary

No.	Nama Program	Satuan Kerja Pelaksana Program
7.	Pembangunan bank sampah.	Corporate Secretary
8.	Pelatihan dan pemberdayaan masyarakat untuk menjadi <i>entrepreneur</i> melalui <i>Business Camp</i> Bank BTN.	Corporate Secretary
9.	Pembangunan sarana prasarana umum (<i>Edu Green Bank</i> BTN) di perumahan subsidi yang dibiayai oleh Bank BTN.	Corporate Secretary
10.	Penanganan kawasan kumuh.	Corporate Secretary
11.	Program taman bacaan masyarakat.	Corporate Secretary
12.	Program pemberantasan buta huruf.	Corporate Secretary

Realisasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) 2023 —

Melalui program TJSL, Perseroan bertujuan untuk memberikan dampak positif bagi kehidupan sosial manusia dan lingkungan. Program TJSL Perseroan diarahkan untuk memberdayakan masyarakat, meningkatkan kualitas hidup, serta menjaga keberlanjutan ekosistem di sekitarnya. TJSL merupakan salah satu pilar penting yang mendorong Perseroan untuk berinovasi dan berkembang bersama masyarakat. Oleh karenanya, dengan

berorientasi pada standar ISO 26000, Perseroan merancang serangkaian program nyata untuk mendukung terciptanya kesejahteraan masyarakat sekaligus memberikan dampak positif bagi Perseroan sendiri. Dengan langkah-langkah ini, Perseroan terus mewujudkan peran strategisnya dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan menciptakan nilai positif bagi seluruh pemangku kepentingan.

Tahun 2023 BTN telah menerima penghargaan sebagai berikut:

31 Mei 2023 Social CSR Initiatives - Pelatihan Developer  Investor Daily	9 Juni 2023 Top CSR Star 4  Top Business	4 Agustus 2023 IDEAS Indonesia DEI & ESG Awards  Humas Indonesia
30 Agustus 2023 TrenAsia ESG Award 2023  TrenAsia	18 September 2023 TrenAsia ESG The Best Financial Sector dan Top 50 Biggest Market Capitalization Public Listed Companies  IICD	26 September 2023 Best Bank for CSR in Indonesia  AsiaMoney
26 Oktober 2023 Anugerah CSR 2023 Kategori Pendidikan  Republika.co.id	6 November 2023 ASRRAT 2023 Gold Rank  National Center for Corporate Reporting (NCCR)	29 November 2022 ESG Disclosure Transparency Awards 2023 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dengan Predikat Leadership AA  Investortrust

Sorotan Kegiatan TJSL Tahun 2023

1. Pilar Sosial

Tumbuh bersama masyarakat menjadi salah satu tujuan utama Perseroan yang diupayakan melalui penyelenggaraan serangkaian kegiatan yang berkontribusi pada peningkatan

kualitas kehidupan sosial, budaya, keagamaan, dan kesejahteraan sosial. Upaya ini sesuai dengan pencapaian TPB 1, 2, 3, 4, dan 5.



BTN Gelar Acara Ramadhan Berfaedah

Direktur Utama Bank BTN Nixon L.P. Napitupulu bersama Komisaris Utama Bank BTN Chandra M. Hamzah secara simbolis memberikan bantuan pendidikan kepada putra/putri berprestasi dari karyawan Tenaga Ahli Daya (TAD) dalam acara Ramadan Berfaedah di Jakarta pada tanggal 12 April 2023. Pada Ramadan tahun ini, Bank BTN mengambil tema "Ramadan Berfaedah" untuk menyampaikan pesan bahwa seyogyanya Ramadan bisa menjadi titik tolak untuk perusahaan bertransformasi menjadi lebih baik lagi dan berorientasi untuk selalu memberi faedah atau manfaat. Sebagai upaya memberikan faedah bagi nasabah dan masyarakat, Bank BTN juga terus berupaya memperbaiki layanan. Di antaranya memperbarui BTN Mobile dengan fitur yg semakin banyak dan bisa memudahkan berbagai transaksi nasabah selama bulan Ramadan.



Gerak Srikandi BTN Berbagi

Direktur Utama Bank BTN Nixon L.P. Napitupulu didampingi Direktur Assets Management Bank BTN Elisabeth Novie Riswanti membagikan paket sembako kepada perwakilan warga sekitar Menara BTN di Jakarta pada tanggal 17 April 2023. Dalam acara yang diberi nama Gerakan Amal dan Kreasi (Gerak) Srikandi tersebut, dibagikan sebanyak lebih dari 6.000 paket yang diberikan kepada masyarakat sekitar lingkungan kerja BTN dan karyawan Tenaga Ahli Daya (TAD).

2. Pilar Ekonomi

Demi mencapai pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang berkualitas dan berkelanjutan, Perseroan melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan peluang kerja dan

peluang usaha. Berbagai kegiatan ini diharapkan dapat menumbuhkan pendapatan dan menurunkan tingkat kemiskinan di masyarakat sesuai dengan TPB 7, 8, 9, 10, dan 17.



Kuliah Umum Developer Milenial

Direktur Utama Bank BTN Nixon L.P. Napitupulu memberikan Kuliah Umum dihadapan 1.200 peserta Pelatihan Developer Milenial Bank BTN yang diselenggarakan di Auditorium Universitas Syiah Kuala (USK), Banda Aceh pada tanggal 13 Oktober 2023. Bank BTN mengajak para mahasiswa untuk menjadi pengusaha properti atau developer yang memiliki potensi bisnis yang besar dikarenakan angka backlog perumahan yang masih tinggi sebanyak 12,71 juta unit.



Bank BTN Gelar Pelatihan BTN Santri Developer

Direktur Utama Bank BTN, Nixon L.P. Napitupulu didampingi Direktur Finance Bank BTN Nofry Rony Poetra secara simbolis memberikan Bantuan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) sarana dan prasarana pendidikan kepada Pengasuh Pondok Pesantren Edi Mancoro Muhamad Hanif usai Membuka Pelatihan BTN Santri Developer di Pondok Pesantren Edi Mancoro di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah pada tanggal 28 Oktober 2023. Tujuan dari BTN Santri Developer adalah guna memberikan edukasi mengenai dunia bisnis properti kepada para santriwan/santriwati alumni pondok pesantren binaan Nahdlatul Ulama.

3. Pilar Lingkungan

Pelestarian lingkungan menjadi suatu hal yang diutamakan oleh Perseroan. Maka dari itu, Perseroan melaksanakan kegiatan-kegiatan pengelolaan sumber daya alam dan

lingkungan yang sekaligus bertujuan untuk meningkatkan kesadaran lingkungan di masyarakat. Upaya ini secara tidak langsung mendukung pencapaian TPB 6, 11, 12, 13, 14, dan 15.



Bank BTN Revitalisasi Taman Hijau di Lingkungan Perumahan

Direktur Utama Bank BTN Nixon L.P. Napitupulu secara simbolis menyerahkan bantuan 1.000 bibit Pohon Tabebuia kepada Ketua Umum Himperra sekaligus CEO Delta Group Property Endang Kawidjaja disaksikan Menteri BUMN Erick Thohir saat seremoni Akad Massal KPR Bank BTN 10.000 unit di Perumahan Puri Delta Tigaraksa, Tangerang, Banten, pada tanggal 8 Agustus 2023. Pada kesempatan tersebut Menteri BUMN bersama Direktur Utama Bank BTN serta Komisaris Utama Bank BTN Chandra M. Hamzah, Penjabat Gubernur Banten Al Muktabar, Dirjen Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto, Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna dan Komisiner BP Tapera Adi Setianto melakukan penanaman pohon bersama.

Anggaran TJSL Bank BTN pada tahun 2023 dialokasikan sebesar Rp80 miliar dengan pencapaian sampai dengan Desember 2023 sebesar Rp79,99 miliar atau sebesar 100%.

No.	Bidang Kegiatan	Rencana Kerja Anggaran per Bidang Tahun 2023 (Rp)	Realisasi s.d. Desember 2023 (Rp)	%
SOSIAL				
1	TPB 1 (Tanpa Kemiskinan)	6.000.000.000	10.505.377.274	175,09%
2	TPB 2 (Tanpa Kelaparan)	13.000.000.000	14.798.413.813	113,83%
3	TPB 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera)	12.000.000.000	12.348.435.325	102,90%
4	TPB 4 (Pendidikan Berkualitas)	8.000.000.000	12.635.697.919	157,95%
5	TPB 5 (Kesejahteraan Gender)	250.000.000	-	0,00%
PILAR EKONOMI				
1	TPB 7 (Energi Bersih dan Terjangkau)	1.000.000.000	50.000.000	5,00%
2	TPB 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi)	5.000.000.000	4.261.935.431	85,24%

No.	Bidang Kegiatan	Rencana Kerja Anggaran per Bidang Tahun 2023 (Rp)	Realisasi s.d. Desember 2023 (Rp)	%
3	TPB 9 (Industri, Inovasi dan Infrastruktur)	7.500.000.000	2.270.000.000	30,27%
4	TPB 10 (Berkurangnya Kesenjangan)	5.000.000.000	5.734.719.287	114,69%
5	TPB 17 (Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan)	1.200.000.000	943.694.328	78,64%
PILAR LINGKUNGAN				
1	TPB 6 (Air Bersih dan Sanitasi Layak)	1.500.000.000	270.000.000	18,00%
2	TPB 11 (Kota dan Pemukiman Yang Berkelanjutan)	12.000.000.000	14.993.831.355	124,95%
3	TPB 12 (Konsumsi dan Produksi Yang Bertanggung Jawab)	500.000.000	-	0,00%
4	TPB 13 (Penanganan Perubahan Iklim)	2.300.000.000	-	0,00%
5	TPB 14 (Ekosistem Lautan)	1.750.000.000	-	0,00%
6	TPB 15 (Ekosistem Daratan)	2.500.000.000	1.184.084.000	47,36%
PILAR HUKUM DAN TATA KELOLA				
1	TPB 16 (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan Yang Tangguh)	500.000.000	-	-
TOTAL		80.000.000.000	79.996.188.732	100,00%

Realisasi TJSL Sesuai 3 (Tiga) Fokus

1. Fokus Pendidikan

TJSL BTN diharapkan akan mendorong atau memberi hal-hal yang positif, seperti program beasiswa kepada anak muda Indonesia agar mendapat kemudahan dan akses ilmu pengetahuan serta teknologi. BTN mendorong, melakukan *upgrading*, atau memberikan hal-hal yang positif dalam bidang pendidikan, seperti misalnya beasiswa kepada anak tidak mampu dan berprestasi, sarana prasarana pendidikan, sarana ruang belajar serta rehabilitasi bangunan belajar mengajar.

Foto-Foto TJSL Bidang Pendidikan 2023



2. Fokus UMKM

TJSL BUMN diarahkan untuk menyiapkan lebih banyak para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di seluruh daerah dengan menyiapkan pembiayaannya serta pemberdayaan UMKM dan ultra mikro untuk naik kelas. BUMN diminta untuk mendorong agar lebih banyak usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan pembiayaan terhadap UMKM yang tercipta.

Dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, Perseroan melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan peluang kerja dan peluang usaha. Berbagai kegiatan ini diharapkan dapat menumbuhkan pendapatan dan menurunkan tingkat kemiskinan di masyarakat sesuai dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Foto-Foto TJSL Bidang UMKM 2023



3. Fokus Lingkungan

TJSL BUMN akan diarahkan untuk menjaga kestabilan alam dengan menyinergikan antara lingkungan hidup, pendapatan masyarakat dan juga perubahan iklim. Salah satunya adalah dengan melakukan penanaman pohon yang bermanfaat, tidak hanya untuk penghijauan dan oksigen, tetapi juga pendapatan masyarakat dan lingkungan hidup, yang difokuskan untuk pelestarian alam dan penghijauan.

Pelestarian lingkungan menjadi suatu hal yang diutamakan oleh Perseroan. Oleh karena itu, Perseroan melaksanakan kegiatan-kegiatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang sekaligus bertujuan untuk meningkatkan kesadaran lingkungan di masyarakat. Upaya ini secara tidak langsung mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Foto-Foto TJSL Bidang Lingkungan 2023



Rincian Program CID Berdasarkan Fokus TJSL

No.	Bidang	Realisasi (Rp)	Kategori Kegiatan	Sebaran Wilayah Bantuan
1.	Lingkungan	28.796.350.680	- Penghijauan Lingkungan Perumahan BTN - Penanaman Bibit Pojok Penanaman Mangrove - Sarana dan Prasarana Kebersihan - Sarana Air Bersih - Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni - Pembangunan MCK - Program Kesehatan Masyarakat	Bantuan TJSL Perseroan telah dilakukan secara merata di seluruh wilayah kerja mulai dari DKI Jakarta, Banjarmasin, Gorontalo, Karawang, Ambon, Lampung, Bandung Timur, Bangkalan, Banyuwangi, Batam, Bengkulu, Bogor, Cibinong, Cikarang, Cilegon, Cirebon, Denpasar, Gresik, Jambi, Jember, Karawaci, Kendari, Kudus, Kupang, Makassar, Malang, Mataram, Medan, Mojokerto, Mulyosari, Palembang, Palu, Panakkukang, Pekanbaru, Pematang Siantar, Pontianak, Purwakarta, Purwokerto, Semarang, Sidoarjo, Solo, Sukabumi, Surabaya, Tanjung Pinang, Tarakan, Tasikmalaya, Malang, Kudus, Medan, Padang, Sukabumi, Tarakan dan Tasikmalaya.
2.	Pendidikan	37.939.489.006	- Bantuan Pembangunan Lembaga Pendidikan - Bantuan Sarana dan Prasarana Pendidikan - Bantuan Universitas Mitra BTN - Bantuan Pembangunan Pondok Pesantren dan Madrasah - Bantuan sarana dan Prasarana Pondok Pesantren dan Madrasah - Bantuan Beasiswa - Bantuan Sarana Umum Sekolah - Bantuan Pengembangan Internet Gratis - Bantuan Taman Bacaan Masyarakat - Pendidikan Developer Millenial Kampus Mitra BTN	Bantuan TJSL Perseroan telah dilakukan secara merata di seluruh wilayah kerja mulai dari DKI Jakarta, Bandung, Cirebon, Ambon, Lampung, Bandung Timur, Bangkalan, Banjarmasin, Batam, Bekasi, Bogor, Cibubur, Cikarang, Ciputat, Cilegon, Gresik, Karawang, Kediri, Magelang, Malang, Manado, Medan, Mojokerto, Palembang, Padang, Panakkukang, Pare Pare, Pekalongan, Pekanbaru, Purwokerto, Semarang, Sidoarjo, Solo, Sukabumi, Tanjung Pinang, Yogyakarta, Mataram, dan Sidoarjo.

No.	Bidang	Realisasi (Rp)	Kategori Kegiatan	Sebaran Wilayah Bantuan
3.	Pemberdayaan UMKM	13.260.349.046	- Pelatihan UMKM - Bantuan Kelompok Tani - Bantuan Sarana Usaha Kelompok - Pembangunan D'Kios Lingkungan Pondok Pesantren - Pembangunan Selasar Siger - Bantuan Sarana dan Prasarana UMKM - Penyuluhan Kepada UMKM Kain Jumpitan - Bantuan Budidaya (tawar dan laut)	Bantuan TJSL Perseroan telah dilakukan secara merata di seluruh wilayah kerja mulai DKI Jakarta, Cibinong, Ambon, Lampung, Bangkalan, Jember, Magelang, Makassar, Padang, Pekalongan, Banjarbaru, Pematang Siantar, Solo, Tanjung Pinang, dan Jogja.

Keberlanjutan Lingkungan

Salah satu pilar dari kerangka kerja *environmental, social, and governance* (ESG) Perseroan adalah pengelolaan atas risiko perubahan iklim dan dampaknya bagi ekosistem (*Climate Change and Ecosystem*). Oleh karena itu, Perseroan telah merancang berbagai program guna memitigasi risiko perubahan iklim.

Langkah ini sekaligus merupakan bentuk kontribusi Perseroan dalam mendukung komitmen pemerintah menuju pencapaian karbon netral (*net zero emission/NZE*) pada tahun 2060 dan untuk mencapai *Sustainable Development Goals* (SDGs) Tujuan ke-13, yaitu penanganan perubahan iklim.



Gotong Royong Boyong Pohon BUMN



Bank BTN menegaskan komitmennya untuk berperan aktif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi dengan mempertimbangkan aspek pendidikan, kesehatan, dan pelestarian lingkungan. Sejalan dengan komitmen ini, Bank BTN ikut serta dalam gerakan Gotong Royong Boyong Pohon yang digagas oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (KBUMN). Komitmen ini mencerminkan keseriusan Perseroan dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan memberikan kontribusi konkret untuk mengatasi dampak perubahan iklim. Di samping itu, komitmen ini juga sejalan dengan SDGs Tujuan ke-13, yaitu Penanganan Perubahan Iklim, dan Tujuan ke-15, yaitu Menjaga Ekosistem Darat.

Program TJSL Konsep Corporate Shared Value (CSV)

1. Program Go Green BTN

No.	Nama Program	TPB	Lokasi	Jenis Bantuan	Jumlah Penerima Manfaat
1.	Penghijauan di Perumahan	TPB 15	Malang, Surabaya, Bukit Darmo, Palembang, Solo, Pangkal Pinang, Jakarta, Pare Pare, Bandar Lampung, Tangerang, Cimahi, Malang, Tasikmalaya, Makassar, Bogor, Pontianak	Pemberian bibit pohon di perumahan yang dibiayai oleh Bank BTN	Penanaman pohon sejumlah 14.841 pohon



Program Revitalisasi Taman Hijau Lingkungan Perumahan Puri Delta Tigaraksa



BTN Jakarta RUN Dukungan Gerakan Jakarta Hijau

Keterangan dampak yang diberikan bagi Penerima Manfaat
Bantuan bibit pohon yang diberikan diharapkan dapat meningkatkan area hijau di perumahan sehingga membuat perumahan menjadi lebih asri dan menjadi hunian yang lebih nyaman.



Manfaat bagi perusahaan

- Jika suatu perumahan menjadi hunian yang nyaman, maka diharapkan kualitas hunian dalam suatu perumahan menjadi meningkat dan pada akhirnya meningkatkan pengajuan KPR kepada Bank BTN dan pengembalian kredit oleh *developer* sesuai dengan perencanaan.
- Sebagai upaya pengurangan emisi gas rumah kaca Bank BTN serta pengurangan polusi udara.

2.	Urban Bike Lingkungan Universitas Gadjah Mada	TPB 3 dan 4	Yogyakarta	Dukungan pengembangan kawasan <i>Educopolis</i> yaitu lingkungan kampus yang kondusif untuk pembelajaran dan ramah lingkungan	150 mahasiswa



TJSL Urban Bike Universitas Gadjah Mada Yogyakarta



Keterangan dampak yang diberikan bagi Penerima Manfaat
Kampus memiliki Sarana prasarana transportasi dalam kampus yang ditata dengan mempertimbangkan berbagai aspek yaitu keselamatan, kenyamanan dan terciptanya udara bersih melalui penyediaan sepeda yang dapat dipergunakan oleh mahasiswa, dosen dan karyawan serta tamu UGM.

Manfaat bagi perusahaan

- Mengenalkan Bank BTN sebagai bank yang fokus terhadap lingkungan kampus.
- Dukungan TJSL BTN kepada Mitra Universitas Bank BTN untuk *branding* Perseroan dan produk layanan Perseroan pada sektor mahasiswa.



2. Program Pendidikan BTN



Manfaat bagi perusahaan

a. Mengenalkan Bank BTN sebagai bank yang fokus terhadap properti kepada *millennial*.

b. Para *millennial* ini diharapkan kelak jika bekerja di dunia properti dapat bekerja sama dengan Bank BTN dalam membantu pemerintah dalam memenuhi *backlog* perumahan kepada masyarakat.

Pada kegiatan ini Bank BTN juga berkolaborasi dengan berbagai stakeholder. Di antara nya asosiasi perumahan dalam hal ini Persatuan Perusahaan Real Estate Indonesia (REI) sebagai mitra strategis Bank BTN. Bank BTN dan REI bersama-sama memberikan materi kepada para mahasiswa dari kampus yang juga merupakan mitra Bank BTN.

No.	Nama Program	TPB	Lokasi	Jenis Bantuan	Jumlah Penerima Manfaat

Program Pelatihan Developer Milenial ini bertujuan untuk memberikan pembekalan kepada kalangan mahasiswa untuk mempersiapkan diri menjadi developer-developer muda yang nantinya bisa membantu pemerintah dalam mengurangi *backlog* perumahan di Indonesia. Selain itu, juga untuk memperkuat *brand awareness* Bank BTN sebagai bank yang paling *concern* terhadap persoalan perumahan di Indonesia.

2022	2023
Desain Program Developer Milenial menjadi Program Inisiatif Bidang Pendidikan untuk membentuk Developer Muda, Lokasi Kegiatan dilaksanakan di Manado, Jember, Cirebon dan Purwakarta bekerja sama dengan <i>Stakeholder</i> BTN dalam hal ini Real Estate Indonesia (REI).	Pengembangan Desain Developer Milenial dengan banyaknya minta dari <i>Stakeholder</i> BTN (REI) untuk dijalankan di beberapa lokasi dengan jumlah lebih banyak.

2024
Developer Milenial masuk pada Program Inisiatif untuk ESG <i>Champion</i> melalui Program TJSL Bidang Pendidikan dan akan dilaksanakan secara <i>Roadshow</i> dan menjadi Program Berkelanjutan BTN.
Tahun 2024, Developer Milenial akan diselenggarakan tidak hanya secara umum namun juga dilakukan secara:
• <i>Roadshow</i> Developer Milenial di Kampus Besar seluruh Indonesia. • Pelatihan spesifikasi kepada Sipil, Arsitek dan Disain. • Melakukan pendampingan dan penghubung antara Developer Milenial dengan REI.

3. Program Pemberdayaan UMKM

No.	Nama Program	TPB	Lokasi	Jenis Bantuan	Jumlah Penerima Manfaat
1	UMKM Go Digital Bank BTN	TPB 8 dan 11	Jepara	Perseroan merangkul para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk terus mengembangkan bisnisnya, agar bisa beradaptasi di era ekonomi digital.	250 UMKM



Workshop dan Pelatihan UMKM *go Digital* wilayah Jepara 10 Oktober 2023



Dukungan UMKM pada Gelaran Developer Milenial Universitas Syiah Kuala Banda Aceh

Keterangan dampak yang diberikan bagi Penerima Manfaat

- Pelaku UMKM dapat memanfaatkan pelaksanaan pelatihan, *showcase* UMKM dan pameran dalam rangka meningkatkan *skill* dan penjualan.
- Mendorong pelaku UMKM agar *Go Digital* untuk bisa beradaptasi dengan perkembangan perilaku konsumen
- Memfasilitasi UMKM menembus pasar ekspor.

Manfaat bagi perusahaan

Bank BTN mendukung para pelaku usaha UMKM untuk meningkatkan penjualan dengan memanfaatkan digital dan produk layanan Bank BTN yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap produk bisnis Bank BTN serta peningkatan ekonomi UMKM.



Program TJSL Unggulan BTN

No.	Nama Program	TPB	Lokasi	Jenis Bantuan	Jumlah Penerima Manfaat
1.	Bank Mini	TPB 4	Cibinong, Tasikmalaya, Bogor, Bekasi, Cirebon, Jakarta, Karawaci, Mataram, Singaraja, Malang, Banyuwangi, Bengkulu, Pangkal Pinang, Siantar, Jambi, Ambon, Lampung, Tegal, Ternate, Palangkaraya, Makassar, Balikpapan, Yogyakarta, Pekalongan	Bank BTN bekerjasama dengan Sekolah Kejuruan Mitra BTN untuk dukungan bantuan berupa replika outlet. Pembangunan Bank Mini sebagai bentuk dukungan Inklusi Keuangan melalui Program TJSL BTN.	30 Sekolah Mitra BTN



TJSL Bank Mini Pangkal Pinang

Program yang diusung bernama Bank Mini, yang bertujuan untuk meningkatkan literasi keuangan di sekolah-sekolah. Selama tahun 2023, program ini telah dijalankan pada lebih dari 30 sekolah, dengan salah satunya di daerah Kupang telah mendapatkan apresiasi dari OJK.

Penunjukkan sekolah yang mendapatkan bantuan TJSL telah melalui proses analisa di internal Bank BTN dengan kriteria di antaranya merupakan nasabah eksisting bank yang memiliki potensi peningkatan simpanan dana di Bank BTN. (tautan salah satu program: <https://youtu.be/IRDjsiP6lw?si=R-YMFsMTNqeJM0Br>)

Program Bank Mini berperan penting dalam peningkatan literasi keuangan bagi siswa SMA/SMK sederajat yang juga berdampak pada dukungan peningkatan kualitas tenaga pengajar melalui praktik dan adanya sarana/prasarana Bank Mini dari Bank BTN. Program ini telah diinisiasi untuk dilaksanakan dilebih dari 30 instansi pendidikan di mana telah berkontribusi pada sektor pendidikan dengan dampak yang sangat membantu proses belajar dan mengajar siswa melalui praktik langsung yang mana sebelumnya terfokus hanya melalui teori.

Keterangan dampak yang diberikan bagi Penerima Manfaat

- Pendidikan Berkualitas untuk menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.
- Kegiatan TJSL Bank Mini sebagai bentuk dukungan Inklusi Keuangan dan mendorong siswa sekolah untuk dapat mengetahui alur kegiatan pada Bank.

Manfaat bagi perusahaan

Bank BTN bekerjasama dengan Sekolah Kejuruan dan Umum yang merupakan Mitra BTN untuk Dukungan Bantuan berupa replika outlet. Pembangunan Bank Mini sebagai bentuk Dukungan Inklusi Keuangan melalui Program TJSL BTN dan juga sebagai bentuk Inklusi Keuangan.

Melalui peraturan yang diterbitkan oleh OJK No. 76/POJK.07/2016 tahun 2016, inklusi keuangan adalah ketersediaan akses akan berbagai lembaga, produk, dan layanan jasa keuangan formal sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Perseroan terus berupaya meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang keuangan. Upaya ini bertujuan mengantisipasi manajemen keuangan yang kurang efektif oleh individu dan kelompok karena kurangnya pengetahuan tentang keuangan. Manajemen keuangan yang kurang efektif berpotensi menyebabkan penggunaan produk dan layanan yang tidak tepat, terutama bagi orang-orang di daerah terpencil dengan ekonomi yang rendah dan akses yang sulit ke sumber daya keuangan.

Dengan latar belakang ini, Perseroan berupaya melakukan pendidikan kepada kelompok tersebut untuk meningkatkan pengetahuan keuangan nasabah. Peningkatan kemampuan nasabah untuk menggunakan produk dan layanan melalui Bank Mini Bank BTN.

Selain Inklusi Keuangan melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Bank BTN, juga dilaksanakan melalui Customer Care Division untuk program Inklusi Keuangan dan Literasi Keuangan.

2.	Rumah Tidak Layak Huni	TPB 3	Denpasar dan Kalimantan	Bank BTN mendukung Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, dengan memberikan bantuan perbaikan rumah bagi keluarga miskin ekstrem	200 unit

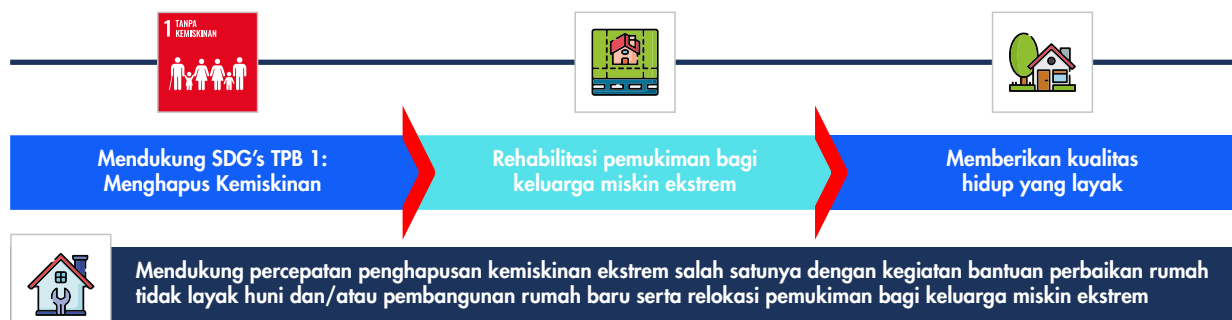


Penyediaan Rumah Layak Huni kerjasama TNI AD Denpasar

Keterangan dampak yang diberikan bagi Penerima Manfaat

- Pembangunan rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni.
- Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem melalui Peningkatan Kualitas Rumah
- Kehidupan Sehat dan Sejahtera dalam menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk

No.	Nama Program	TPB	Lokasi	Jenis Bantuan	Jumlah Penerima Manfaat



Manfaat bagi perusahaan

Bank BTN mendukung Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem melalui Pembangunan rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni.

Kinerja Program Pendanaan UMK Tahun 2023

Ketentuan PUMK

- Surat Menteri BUMN No. S-721/MBU/11/2022 tanggal 10 November 2022 perihal Kerja Sama Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil ("Kerja Sama Program PUMK").
- Peraturan Menteri BUMN No. PER-1/MBU/03/2023 tanggal 03 Maret 2023 perubahan atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-06/MBU/09/2022 tanggal 8 September 2022 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
- Peraturan Menteri BUMN No. SK-277/MBU/10/2023 tanggal 04 Oktober 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Piutang Dan/Atau Pembiayaan Syariah Bermasalah Pada Program Pendaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil di BUMN.
- Petunjuk Teknis I-XIV.1 tanggal 23 Februari 2023 tentang Alur Kerja Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil.

- Kebijakan Khusus I-XIV tanggal 14 Agustus 2023 tentang Produk Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil.
- Perjanjian Kerja Sama BTN No. 03/PKS/SMBD/X/2023 dengan BRI No. B.34/MBD/10/2023 tanggal 13 Oktober 2023 tentang Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil.
- Berita Acara BTN No. 01/BA/SMBD/X/2023 dengan BRI No. B.751-MBD/10/2023 tanggal 18 Oktober 2023 tentang Penyetoran Dana Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

Sumber Dana Program PUMK

- Dana pokok pengembalian pinjaman Mitra Binaan.
- Saldo dana Program PUMK yang teralokasi sampai dengan akhir tahun.
- Jasa administrasi pinjaman/margin jual beli/porsi bagi hasil, bunga deposito dan/atau jasa giro dari dana Program PUMK.

Arus Kas PUMK Tahun 2023

No	Uraian	RKA 2022	Realisasi 2022	(%)	RKA	Realisasi 2023	(%)
		1	2	(2:1)	3	4	(4:3)
I. Dana Tersedia							
1.	Saldo Awal	15.254.304.860	15.254.304.860	100%	11.732.472.238	11.732.472.238	100%
2.	Tambahan Dana Dari BUMN Pembina	-	-	-	-	-	-
3.	Pengembalian Pinjaman Mitra Binaan	11.500.000.000	13.799.087.350	119,99%	15.000.000.000	15.264.329.788	101,76%
4.	Pengembalian Dana dari BUMN Pembina Lain	-	-	-	-	-	-
5.	Pendapatan Jasa Administrasi Pinjaman	1.400.000.000	1.063.597.362	75,97%	1.100.000.000	1.132.613.855	102,96%
6.	Pendapatan Lain	-	1.932.666	-	-	-	-
7.	Penerimaan Belum Teridentifikasi	-	-	-	-	-	-
8.	Beban Lain-Lain	-	-	-	-	-	-
9.	Total Dana Tersedia	28.154.304.860	30.118.922.238	106,98%	27.832.472.238	28.129.415.881	101,07%
II. Dana Disalurkan							
10	Penyaluran Pinjaman Kepada Mitra Binaan	17.500.000.000	18.386.450.000	105,07%	18.000.000.000	9.161.600.000	50,90%
11	Penyaluran Pinjaman Melalui BUM/ Kolaborasi	-	-	-	-	8.000.000.000	-
12	Penyaluran Dana Pembinaan (Hibah)	-	-	-	-	-	-
13	Penyaluran BUMN Khusus	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Penyaluran Dana	17.500.000.000	18.386.450.000	105,07%	18.000.000.000	17.161.600.000	95,34%
	Saldo Akhir per 31 Desember	10.654.304.860	11.732.472.238	110,12%	9.832.472.238	10.970.559.980	111,57%

Penyaluran Program Pendanaan UMK

	2022	2023
Target	Rp17,5 Miliar	Rp18 Miliar
Realisasi	Rp18,38 Miliar	Rp17,16 Miliar
Pencapaian	105,07%	95,34%

Komposisi Penyaluran Berdasarkan Sektor

Sektor Usaha	Realisasi Penyaluran Tahun 2022			Realisasi Penyaluran Tahun 2023		
	Jumlah MB	Total	Presentase	Jumlah MB	Total	Presentase
Sektor Industri	20	Rp904.000.000	4,92%	4	Rp170.000.000	1,85%
Sektor Jasa	56	Rp4.183.500.000	22,75%	26	Rp1.622.000.000	17,70%
Sektor Perdagangan	292	Rp12.705.750.000	69,10%	129	Rp6.529.600.000	71,27%
Sektor Perikanan	4	Rp108.200.000	0,59%	2	Rp100.000.000	1,09%

Sektor Usaha	Realisasi Penyaluran Tahun 2022			Realisasi Penyaluran Tahun 2023		
	Jumlah MB	Total	Presentase	Jumlah MB	Total	Presentase
Sektor Pertanian	1	Rp50.000.000	0,27%	4	Rp95.000.000	1,04%
Sektor Peternakan	1	Rp410.000.000	2,23%	3	Rp95.000.000	1,04%
Sektor Perkebunan	1	Rp25.000.000	0,14%	2	Rp550.000.000	6,00%
Sektor Usaha Lainnya	-	-	-	-	-	-
Grand Total	378	Rp18.386.450.000	100%	170	Rp9.161.600.000	100%

Komposisi Penyaluran Berdasarkan Daerah

No.	Wilayah	Realisasi Tahun 2022		Realisasi Tahun 2023	
		Jumlah MB	Nilai	Jumlah MB	Nilai
1	Bali	4	Rp105.000.000	1	Rp60.000.000
2	DI Yogyakarta	11	Rp281.000.000	4	Rp115.000.000
3	DKI Jakarta	40	Rp2.576.000.000	10	Rp788.000.000
4	Jawa Tengah	35	Rp1.864.000.000	25	Rp1.001.600.000
5	Jawa Timur	38	Rp2.290.000.000	14	Rp980.000.000
6	Jawa Barat & Banten	113	Rp4.594.500.000	38	Rp1.882.000.000
7	Kalimantan	21	Rp1.321.000.000	18	Rp780.000.000
8	Maluku	15	Rp642.000.000	4	Rp245.000.000
9	Nusa Tenggara Barat	9	Rp313.000.000	13	Rp525.000.000
10	Nusa Tenggara Timur	5	Rp145.500.000	9	Rp880.000.000
11	Papua	1	Rp25.000.000	-	-
12	Sulawesi	30	Rp1.159.450.000	16	Rp970.000.000
13	Sumatera	56	Rp3.070.000.000	18	Rp935.000.000
Total		378	Rp18.386.450.000	170	Rp9.161.600.000

Jumlah Mitra Binaan dan Rincian Piutang sampai dengan 31 Desember 2023

Total Mitra Binaan	
6.967 Debitur	

	2022		2023	
	Jumlah (Rp)	(%)	Jumlah (Rp)	(%)
Lancar	18.257.799.972	36,96	3.452.460.063	7,00
KL	4.535.941.159	7,38	7.303.272.049	14,81
Diragukan	1.649.878.829	2,76	4.950.359.453	10,04
Macet	31.161.220.926	52,90	33.616.019.533	68,16
Total	55.604.840.886	100	49.322.111.098	100

Penyaluran Program PUMK Tahun 2023

Besaran Penyaluran Program PUMK pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp17,16 miliar.



Pembinaan Mitra Binaan Program Pendanaan UMK

Pelaksanaan pembinaan dilakukan dengan cara *visit / On The Spot (OTS)* secara triwulan Mitra Binaan oleh BTN Kantor Cabang pembina. Proses monitoring dan evaluasi terhadap usaha masing-masing Mitra Binaan menjadi penting agar proses berjalannya usaha dapat berlangsung secara berkelanjutan.

Toko Kelontong



Nama	Muslihudin
Wilayah	Medan
Realisasi	23 Juni 2022
Plafond	Rp25.000.000
Tenor	3 Tahun
Kolektibilitas	Lancar

Penjual Makanan



Nama	Dwi Wahyu Purbo S.
Wilayah	Jambi
Realisasi	05 Juli 2022
Plafond	Rp100.000.000
Tenor	2 Tahun
Kolektibilitas	Lancar

Toko Ponsel



Nama	Magdalena Sembiring
Wilayah	Medan
Realisasi	19 Desember 2022
Plafond	Rp150.000.000
Tenor	3 Tahun
Kolektibilitas	Lancar

Barbershop



Nama	Aditya Cella
Wilayah	Palu
Realisasi	12 Juni 2023
Plafond	Rp50.000.000
Tenor	3 Tahun
Kolektibilitas	Lancar

Literasi dan Inklusi Keuangan – Pemenuhan POJK 3/2023 Tentang Literasi dan Inklusi Keuangan —

Perseroan memenuhi kewajiban kepada Pemangku Kepentingan dan OJK sesuai ketentuan, yaitu terkait transparansi dan publikasi kondisi keuangan dan non keuangan. Informasi lainnya bertujuan untuk mendukung keterbukaan informasi, edukasi keuangan dan layanan kepada masyarakat. Perseroan telah memiliki laporan terkait Literasi dan Inklusi Keuangan antara lain:

- Laporan Pelaksanaan Kegiatan Literasi dan Inklusi Keuangan tahun 2023: dilaporkan setiap triwulan (Maret, Juni, September, Desember).
- Laporan Perencanaan Kegiatan Literasi dan Inklusi Keuangan tahun 2024: dilaporkan pada November 2023.

Berbagai kegiatan Literasi dan Inklusi Keuangan yang telah dilaporkan kepada regulator (BI dan OJK) sebagai berikut:

Literasi Keuangan Tahun 2023

No.	Stream	Cakupan	Nama Kegiatan	Periode		Frekuensi
				Mulai	Berakhir	
1.	<i>Funding</i>	Edukasi Keuangan	<i>Talkshow entrepreneurship</i> dengan bintang tamu Alan Budi Kusuma dan Susi Susanti	23 Januari 2023	29 Januari 2023	1 Kali
2.	<i>Lending</i>	Edukasi Keuangan	<i>Marketing dan Developer Gathering</i>	4 Mei 2023	4 Mei 2023	1 Kali

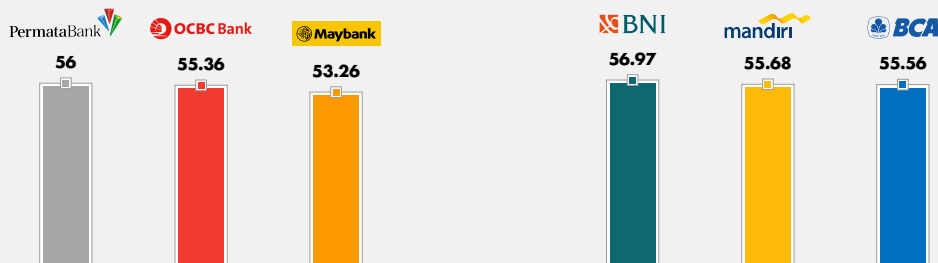
No.	Stream	Cakupan	Nama Kegiatan	Periode		Frekuensi
				Mulai	Berakhir	
3.	Digital	Edukasi Keuangan	Edukasi ke Nasabah tentang Keamanan Informasi	1 Januari 2023	31 Desember 2023	1 Kali
4.	Inklusi	Edukasi Keuangan	Program SIMOLEK (Jawa Barat)	1 Juli 2023	30 September 2023	1 Kali
5.	Inklusi	Edukasi Keuangan	Program SIMOLEK (Kupang, Surabaya, Denpasar, Malang, Mataram, Bangkalan, Madiun, Jember, Kediri, Singaraja, Banyuwangi)	27 Juli 2023	8 September 2023	1 Kali
6.	Inklusi	Edukasi Keuangan	Program SIMOLEK (Makassar, Palangkaraya, Gorontalo)	9 Agustus 2023	9 Agustus 2023	1 Kali
7.	Funding	Edukasi Keuangan	Sosialisasi Wakaf Uang di Lingkungan Pendidikan	1 Agustus 2023	20 Desember 2023	1 Kali
8.	Communication & Partnerships	Edukasi Keuangan	SRIKANDI Goes to Campus	14 Agustus 2023	14 Agustus 2023	1 Kali
9.	Funding	Edukasi Keuangan	BTN Market Beat September 2023	16 September 2023	16 September 2023	1 Kali
10.	Lending	Edukasi Keuangan	Sosialisasi Program KPR Subsidi	19 Oktober 2023	19 Oktober 2023	1 Kali
11.	Lending	Edukasi Keuangan	Pendidikan dan Pelatihan kepada Developer muda bekerja sama dengan HFC (Santri Developer dan Developer Milenial)	28 Oktober 2023	28 Oktober 2023	1 Kali
12.	Lending	Edukasi Keuangan	Pelatihan dan Pemberdayaan masyarakat untuk menjadi entrepreneur melalui Business Camp Bank BTN	9 November 2023	9 November 2023	1 Kali
13.	Lending	Edukasi Keuangan	Literasi Keuangan Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pemegang Jepang	14 Desember 2023	14 Desember 2023	1 Kali

Inklusi Keuangan Tahun 2023

No.	Stream	Cakupan	Nama Kegiatan	Periode		Frekuensi
				Mulai	Berakhir	
1.	Digital	Perluasan Akses	Launching Super Apps BTN Mobile	9 Februari 2023	31 Mei 2023	1 Kali
2.	Reporting	Penyediaan Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan	Peningkatan layanan BTN Call 150286 dan 1500286	3 Mei 2023	3 Mei 2023	1 Kali
3.	Lending	Perluasan Akses	Persemin Sales Center KPR BTN untuk meningkatkan Market Share	16 Juni 2023	16 Juni 2023	1 Kali
4.	Lending	Penyediaan Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan	Akad KPR Massal 10.000 unit di Perumahan Puri Delta Tigaraksa	8 Agustus 2023	8 Agustus 2023	1 Kali
5.	Lending	Penyediaan Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan	Peningkatan penyaluran KPR untuk sektor syariah dan Olahraga	9 September 2023	26 September 2023	1 Kali
6.	Funding	Penyediaan Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan	Roadshow Tabungan BTN Bisnis bersama Alan Budi Kusuma dan Direktur Distribution Funding	23 September 2023	23 September 2023	1 Kali
7.	Digital	Perluasan Akses	Penambahan Fitur Pembayaran BI-Fast dan lainnya pada BTN Mobile (Mobile Banking)	1 Januari 2023	31 Desember 2023	1 Kali
8.	Lending	Penyediaan Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan	Kegiatan BTNPpreneur berupa Bazaar UMKM Binaan Bank BTN	1 Januari 2023	31 Desember 2023	2 Kali
9.	Inklusi	Perluasan Akses	Pembukaan Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu (Konvensional dan Syariah)	1 Januari 2023	31 Desember 2023	19 Kali
10.	Inklusi	Perluasan Akses	Penambahan Mobil Kas Keliling (BTNMov) pada tahun 2023 untuk peningkatan ketersediaan akses produk dan layanan Bank BTN	1 Januari 2023	31 Desember 2023	8 Kali
11.	Funding	Penyediaan Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan	Gathering untuk meningkatkan penggunaan produk SBN Perdana	10 Juli 2023	10 Juli 2023	2 Kali

Satisfaction, Loyalty, Engagement (SLE) Index Survey 2024

SLE Index 2022 (%)



KBMI 3

KBMI 4

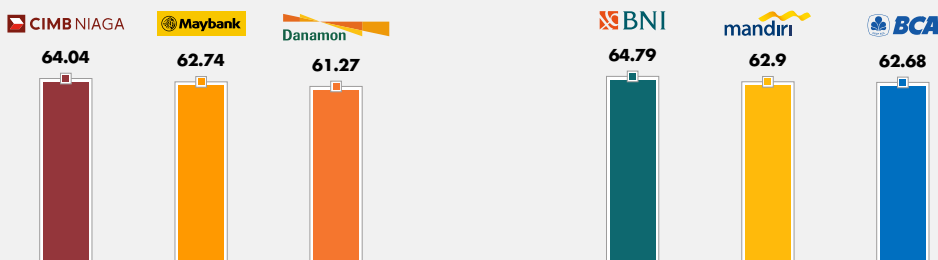
Disusun berdasarkan nilai indeks (%)

- Industri : -
- KBMI 4 : -

- KBMI 3 : 52.15 ▼
- Bank @ **BTN** : 48.64

"Posisi ke-10 pada KBMI 3"

SLE Index 2023 (%)



KBMI 3

KBMI 4

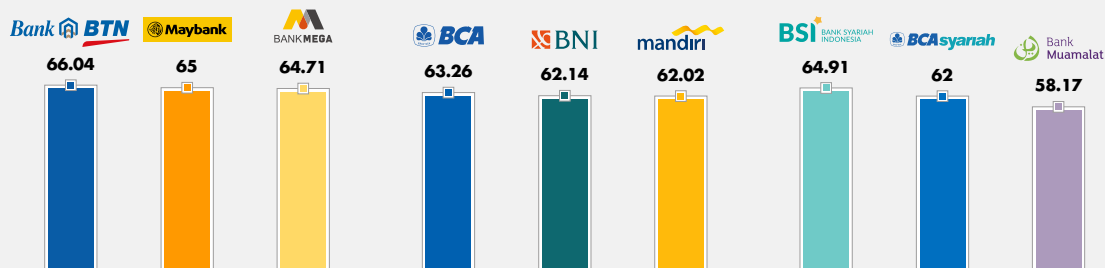
Disusun berdasarkan nilai indeks (%)

- Industri : 61.18 ▼
- KBMI 4 : 62.38

- KBMI 3 : 59.19 ▲
- Bank @ **BTN** : 60.00

"Posisi ke-4 pada KBMI 3"

SLE Index 2024 (%)



KBMI 3

KBMI 4

BUS

Disusun berdasarkan nilai indeks (%)

- Industri : 61.82 ▲
- KBMI 4 : 61.25
- KBMI 3 : 61.59 ▲

- BUS : 61.79
- Bank @ **BTN** : 66.04

"Posisi ke-1 pada KBMI 3"

*Measured by : Tim Marketing Research Indonesia (MRI)



INDEKS REFERENSI OJK



Indeks Referensi OJK

KRITERIA	PENJELASAN	HALAMAN	REGULASI
UMUM			
Laporan Tahunan harus dicetak dan dijilid.		✓	POJK 29
Laporan Tahunan harus dapat diperbanyak dalam bentuk salinan dokumen cetak dan salinan dokumen elektronik.		✓	POJK 29
Laporan Tahunan wajib disajikan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing		✓	POJK 29
Laporan Tahunan wajib dimuat dalam Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik pada tanggal yang sama dengan penyampaian Laporan Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan.		✓	POJK 29
KILAS KINERJA			
Ikhtisar data keuangan penting memuat informasi keuangan yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika Emiten atau Perusahaan Publik tersebut menjalankan kegiatan usahanya kurang dari 3 (tiga) tahun.	Informasi memuat antara lain:		
	1. Pendapatan/penjualan.	21	SEOJK 16
	2. Laba bruto.	22	
	3. Laba Operasional.	22	
	4. Laba sebelum pajak.	22	SEOJK 9
	5. Laba bersih.	22	
	6. Laba (rugi).	22	
	7. Total laba (rugi) komprehensif.	22	SEOJK 9
	8. Jumlah laba (rugi) yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali.	-	SEOJK 16
	9. Total laba (rugi) komprehensif.	22	SEOJK 16
	10. Jumlah laba (rugi) komprehensif yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non Pengendali.	-	
	11. Laba (rugi) per saham.	22	
	12. Jumlah aset.	19	SEOJK 9 SEOJK 16
	13. Jumlah liabilitas.	20	
	14. Jumlah ekuitas.	21	
	15. Dana pihak ketiga.	19	SEOJK 9
	16. Pinjaman yang diterima.	20	
	17. Rasio laba (rugi) terhadap jumlah aset.	24	
	18. Rasio laba (rugi) terhadap ekuitas.	24	SEOJK 16
	19. Rasio laba (rugi) terhadap pendapatan/penjualan.	24	
	20. Rasio lancar.	24	
	21. Rasio liabilitas terhadap ekuitas.	24	
	22. Rasio liabilitas terhadap jumlah aset.	24	

KRITERIA	PENJELASAN	HALAMAN	REGULASI
	23. Rasio KPMM.	24	SEOJK 9
	24. Aset produktif.	24	
	25. Rasio <i>Non-performing Loans</i> (NPL).	24	
	26. Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO).	24	
	27. <i>Cost to Income Ratio</i> (CIR).	24	
	28. Rasio <i>Net Interest Margin</i> (NIM).	24	
	29. Persentase pelanggaran dan pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).	24	
	30. Rasio Giro Wajib Minimum (GWM).	24	
	31. Rasio Posisi Devisa Neto (PDN).	24	
	32. Informasi dan rasio keuangan lainnya yang relevan dengan emiten atau perusahaan publik dan jenis industrinya.	24	SEOJK 9 SEOJK 16
Informasi Saham	Informasi saham bagi Perusahaan Terbuka paling sedikit memuat:		SEOJK 16
	1. Saham yang telah diterbitkan untuk setiap masa triwulan yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 2 (dua) tahun buku terakhir, paling sedikit memuat:	25-26	
	a. Jumlah saham yang beredar.		
	b. Kapitalisasi pasar berdasarkan harga pada bursa efek tempat saham dicatatkan.		
	c. Harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan berdasarkan harga pada bursa efek tempat saham dicatatkan.		
	d. <i>Volume</i> perdagangan pada bursa efek tempat saham dicatatkan.		
	Informasi dalam huruf b), huruf c) dan huruf d) hanya diungkapkan jika sahamnya tercatat di bursa efek. Informasi disajikan dalam bentuk grafik dan tabel.		SEOJK 16
	2. Dalam hal terjadi aksi korporasi yang menyebabkan terjadinya perubahan pada saham, seperti pemecahan saham (<i>stock split</i>), penggabungan saham (<i>reverse stock</i>), dividen saham, saham bonus, perubahan nilai nominal saham, penerbitan efek konversi, serta penambahan dan pengurangan modal, informasi saham sebagaimana dimaksud pada angka 1) ditambahkan penjelasan paling sedikit mengenai:	27	
	a. Tanggal pelaksanaan aksi korporasi.		
	b. Rasio pemecahan saham (<i>stock split</i>), penggabungan saham (<i>reverse stock</i>), dividen saham, saham.		
	c. bonus, jumlah efek konversi yang diterbitkan, dan perubahan nilai nominal saham.		
	d. Jumlah saham beredar sebelum dan sesudah aksi korporasi.		
	e. Jumlah efek konversi yang dilaksanakan (jika ada).		
	f. Harga saham sebelum dan sesudah aksi korporasi.		
	3. Dalam hal terjadi penghentian sementara perdagangan saham (<i>suspension</i>) dan/atau pembatalan pencatatan saham (<i>delisting</i>) dalam tahun buku, dijelaskan alasan penghentian sementara perdagangan saham (<i>suspension</i>) dan/atau pembatalan pencatatan saham (<i>delisting</i>) tersebut.	29	SEOJK 16
	4. Dalam hal penghentian sementara perdagangan saham (<i>suspension</i>) sebagaimana dimaksud pada angka 3) dan/ atau proses pembatalan pencatatan saham (<i>delisting</i>) masih berlangsung hingga akhir periode Laporan Tahunan, dijelaskan tindakan yang dilakukan untuk menyelesaikan penghentian sementara perdagangan saham (<i>suspension</i>) dan/atau pembatalan pencatatan saham (<i>delisting</i>) tersebut.	29	SEOJK 16



KRITERIA	PENJELASAN	HALAMAN	REGULASI
LAPORAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS			
Laporan Direksi	Laporan Direksi paling sedikit memuat uraian singkat mengenai:		
	1. Kinerja Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat:		
	a. Strategi dan kebijakan strategis Emiten atau Perusahaan Publik (termasuk untuk UUS apabila Bank memiliki UUS).	50-51	SEOJK 9 SEOJK 16
	b. Peranan Direksi dalam perumusan strategi dan kebijakan strategis Emiten atau Perusahaan Publik.	50	SEOJK 16
	c. Proses yang dilakukan Direksi untuk memastikan implementasi strategi Emiten atau Perusahaan Publik.	50	
	d. Perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan Emiten atau Perusahaan Publik.	52	SEOJK 9 SEOJK 16
	e. Kendala yang dihadapi Emiten atau Perusahaan Publik.	52	
	f. Struktur organisasi.	45-46	SEOJK 9
	g. Aktivitas utama.	45	
	h. Teknologi informasi.	46	
	i. Jenis produk dan jasa yang ditawarkan, termasuk penyaluran kredit kepada debitur usaha mikro, kecil, dan menengah.	45	
	j. Tingkat suku bunga penghimpunan dan penyediaan dana.	47-49	
	k. Perkembangan perekonomian dan target pasar.	46-47	
	l. Jaringan kerja dan mitra usaha di dalam dan/atau di luar negeri.	45	
	m. Jumlah, jenis, dan lokasi kantor.	45	
	n. Kepemilikan Direksi, Dewan Komisaris, dan pemegang saham dalam kelompok usaha Bank.	N/A	
	o. Perubahan-perubahan penting yang terjadi pada Bank dan kelompok usaha Bank dalam tahun yang bersangkutan.	N/A	
	p. Hal-hal penting yang diperkirakan terjadi pada masa mendatang.	53-54	
	q. Sumber daya manusia meliputi jumlah, tingkat pendidikan, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia.	46	
	2. Gambaran tentang prospek usaha Emiten atau Perusahaan Publik.	53-54	SEOJK 9 SEOJK 16
	3. Penerapan tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik.	54-57	
Laporan Dewan Komisaris	Laporan Dewan Komisaris paling sedikit memuat uraian singkat mengenai:		
	1. Penilaian terhadap kinerja Direksi mengenai pengelolaan Emiten atau Perusahaan Publik, termasuk pengawasan Dewan Komisaris dalam perumusan dan implementasi strategi Emiten atau Perusahaan Publik yang dilakukan oleh Direksi.	63-64	SEOJK 16 SEOJK 9
	2. Pandangan atas prospek usaha Emiten atau Perusahaan Publik yang disusun oleh Direksi.	65	
	3. Pandangan atas penerapan tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik.	65-68	
	4. Perubahan komposisi Dewan Komisaris (jika ada) dan alasan perubahannya.	68-69	SEOJK 9
	5. Frekuensi dan cara pemberian nasihat kepada anggota Direksi.	63	
Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris	Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan Surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan disusun sesuai dengan format Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan.	76-77	SEOJK 16 POJK 29

KRITERIA	PENJELASAN	HALAMAN	REGULASI
PROFIL PERUSAHAAN			
Nama dan alamat lengkap perusahaan	Akses terhadap Emiten atau Perusahaan Publik termasuk kantor cabang atau kantor perwakilan yang memungkinkan masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai Emiten atau Perusahaan Publik, meliputi:	80-81	SEOJK 9 SEOJK 16
	1. Alamat		
	2. Nomor telepon		
	3. Alamat surat elektronik		
	4. Alamat situs web		
Nama dan alamat entitas anak dan/atau kantor cabang atau kantor perwakilan (jika ada)	Memuat informasi antara lain:	82-87	SEOJK 9 SEOJK 16
	1. Nama dan alamat entitas anak, meliputi:		
	a. Alamat		
	b. Nomor telepon		
	c. Alamat surat elektronik		
	d. Alamat situs web		
	2. Nama dan alamat kantor cabang/perwakilan, meliputi:		
	a. Alamat		
	b. Nomor telepon		
	c. Alamat surat elektronik		
	d. Alamat situs web		
	Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki entitas anak, kantor cabang, dan kantor perwakilan, agar diungkapkan.		
Riwayat singkat Emiten atau Perusahaan Publik	Mencakup antara lain: tanggal/tahun pendirian, nama, perubahan nama perusahaan (jika ada), dan tanggal efektif perubahan nama perusahaan.	92-93	SEOJK 9 SEOJK 16
	Catatan: apabila perusahaan tidak pernah melakukan perubahan nama, agar diungkapkan.		
Visi, Misi, dan Budaya Perusahaan	Mencakup:		SEOJK 9 SEOJK 16
	1. Visi Perusahaan	94	
	2. Misi Perusahaan	95	
	3. Pernyataan mengenai budaya perusahaan (<i>corporate culture</i>) yang dimiliki Perusahaan.	96-99	
Kegiatan Usaha	Uraian mengenai antara lain:		SEOJK 9 SEOJK 16
	1. Kegiatan usaha perusahaan menurut anggaran dasar terakhir.	100	
	2. Kegiatan usaha yang dijalankan.	100	
	3. Produk dan/atau jasa yang dihasilkan.	103-114	
Wilayah Operasional	Wilayah operasional Emiten atau Perusahaan Publik. Wilayah operasional merupakan wilayah atau daerah pelaksanaan kegiatan operasional atau jangkauan dari kegiatan operasional perusahaan.	116-117	SEOJK 16
Struktur Organisasi	Struktur organisasi Emiten atau Perusahaan Publik dalam bentuk bagan, paling sedikit sampai dengan struktur 1 (satu) tingkat di bawah Direksi termasuk komite di bawah Direksi (jika ada) dan komite di bawah Dewan Komisaris, disertai dengan nama dan jabatan.	118-119	SEOJK 9 SEOJK 16
Keanggotaan Asosiasi	Daftar keanggotaan asosiasi industri baik dalam skala nasional maupun internasional yang berkaitan dengan penerapan keuangan berkelanjutan.	115	SEOJK 16



KRITERIA	PENJELASAN	HALAMAN	REGULASI
Profil Direksi	Profil Direksi, paling sedikit memuat:	120-133	SEOJK 9 SEOJK 16
	1. Nama dan jabatan yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab.		
	2. Foto terbaru.		
	3. Usia.		
	4. Kewarganegaraan.		
Profil Direksi	5. Riwayat pendidikan dan/atau sertifikasi.	120-133	SEOJK 9 SEOJK 16 POJK 13
	6. Riwayat jabatan, meliputi informasi:		
	a. Dasar hukum pengangkatan sebagai anggota Direksi pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan		
	b. Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal anggota Direksi tidak memiliki rangkap jabatan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.		
	c. Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik.		
Profil Dewan Komisaris	7. Hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu, meliputi nama pihak yang terafiliasi. Dalam hal anggota Direksi tidak memiliki hubungan afiliasi, maka Emiten atau Perusahaan Publik mengungkapkan hal tersebut. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris lain, dan/atau pemegang saham pengendali Bank.	134-144	SEOJK 9 SEOJK 16 POJK 13
	8. Perubahan komposisi anggota Direksi dan alasan perubahannya. Dalam hal tidak terdapat perubahan komposisi anggota Direksi, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.		
	Profil Dewan Komisaris, paling sedikit memuat:		
	1. Nama dan jabatan.		
	2. Foto terbaru.		
Profil Dewan Komisaris	3. Usia.	134-144	SEOJK 9 SEOJK 16 POJK 17
	4. Kewarganegaraan.		
	5. Riwayat pendidikan dan/atau sertifikasi.		
	6. Riwayat jabatan, meliputi informasi:		
	a. Dasar hukum pengangkatan sebagai anggota Dewan Komisaris		
Profil Dewan Komisaris	b. Dasar hukum pengangkatan pertama kali sebagai anggota Dewan Komisaris yang merupakan komisaris independen pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan.	134-144	SEOJK 9 SEOJK 13 SEOJK 16 POJK 17
	c. Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak memiliki rangkap jabatan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.		
	d. Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik.		
	7. Hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu, meliputi nama pihak yang terafiliasi. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan afiliasi, maka Emiten atau Perusahaan Publik mengungkapkan hal tersebut. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris lain, dan/atau pemegang saham pengendali Bank.		

KRITERIA	PENJELASAN	HALAMAN	REGULASI
	8. Pernyataan independensi komisaris independen dalam hal komisaris independen telah menjabat lebih dari 2 (dua) periode.		SEOJK 16
	9. Perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris dan alasan perubahannya. Dalam hal tidak terdapat perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.		
Profil singkat pejabat eksekutif	Termasuk susunan pejabat eksekutif beserta jabatan dan ringkasan Riwayat hidup.	150-168	SEOJK 9
Jumlah karyawan dan data pengembangan kompetensi karyawan.	Jumlah karyawan menurut jenis kelamin, jabatan, usia, tingkat pendidikan, dan status ketenagakerjaan (tetap/kontrak) dalam tahun buku.	168-170	SEOJK 9 SEOJK 16
	Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel.		
Komposisi pemegang saham	Nama pemegang saham dan persentase kepemilikan pada awal dan akhir tahun buku, yang terdiri dari informasi mengenai:	170-175	SEOJK 9 SEOJK 16 POJK 17
	1. Pemegang saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih saham Emiten atau Perusahaan Publik.		
	2. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang memiliki saham Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal seluruh anggota Direksi dan/atau seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.		
	3. Persentase kepemilikan tidak langsung atas saham Emiten atau Perusahaan Publik oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris pada awal dan akhir tahun buku, termasuk informasi mengenai pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham untuk kepentingan kepemilikan tidak langsung anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Dalam hal seluruh anggota Direksi dan/atau seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki kepemilikan tidak langsung atas saham Emiten atau Perusahaan Publik, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.		
	4. Kelompok pemegang saham masyarakat, yaitu kelompok pemegang saham yang masing-masing memiliki kurang dari 5% (lima persen) saham Emiten atau Perusahaan Publik.		SEOJK 16
	5. Jumlah pemegang saham dan persentase kepemilikan per akhir tahun buku berdasarkan klasifikasi:		SEOJK 16
	a. Kepemilikan institusi lokal.		
	b. Kepemilikan institusi asing.		
	c. Kepemilikan individu lokal.		
	d. Kepemilikan individu asing.		
	Informasi di atas dapat disajikan dalam bentuk tabel.		
Pemegang saham utama dan pengendali	Informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali Emiten atau Perusahaan Publik, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu, yang disajikan dalam bentuk skema atau bagan.	175	SEOJK 9 SEOJK 16
Daftar entitas anak perusahaan asosiasi, perusahaan ventura	Nama entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama dimana Emiten atau Perusahaan Publik memiliki pengendalian bersama entitas (jika ada), beserta persentase kepemilikan saham, bidang usaha, total aset, dan status operasi entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama. Untuk entitas anak, ditambahkan informasi mengenai alamat entitas anak tersebut.	175	SEOJK 9 SEOJK 16



KRITERIA	PENJELASAN	HALAMAN	REGULASI
Informasi terkait dengan Kelompok Usaha Bank	Bank yang merupakan bagian dari suatu kelompok usaha dan/atau memiliki Entitas Anak, harus menambahkan dengan:		SEOJK 9
	Struktur kelompok usaha Bank yang meliputi:		
	a. Struktur kelompok usaha Bank, antara lain terdiri dari Bank, Entitas Anak, perusahaan terelasi (<i>sister company</i>), Entitas Induk sampai dengan <i>ultimate shareholder</i> .	175	
	b. Struktur keterkaitan kepengurusan dalam kelompok usaha Bank.		
	c. Pemegang saham yang bertindak atas nama pemegang saham lain. Pengertian pemegang saham yang bertindak atas nama pemegang saham lain adalah pemegang saham perorangan atau entitas yang memiliki tujuan bersama yaitu mengendalikan Bank, berdasarkan atau tidak berdasarkan suatu perjanjian.		
Kronologis pencatatan saham	Kronologis pencatatan saham, jumlah saham, jumlah saham tercatat setelah masing-masing tindakan korporasi (<i>corporate action</i>), nilai nominal, dan harga penawaran dari awal pencatatan hingga akhir tahun buku serta nama bursa efek dimana saham Emiten atau Perusahaan Publik dicatatkan, termasuk pemecahan saham (<i>stock split</i>), penggabungan saham (<i>reverse stock</i>), dividen saham, saham bonus, dan perubahan nilai nominal saham, pelaksanaan efek konversi, pelaksanaan penambahan dan pengurangan modal (jika ada).	176-178	SEOJK 16
Informasi pencatatan efek lainnya	Informasi pencatatan efek lainnya yang belum jatuh tempo pada tahun buku paling sedikit memuat nama efek, tahun penerbitan, tingkat suku bunga/imbal hasil, tanggal jatuh tempo, nilai penawaran, dan peringkat efek (jika ada).	178-187	SEOJK 16
Informasi penggunaan jasa akuntan publik (AP) dan kantor akuntan publik (KAP)	Informasi penggunaan jasa akuntan publik (AP) dan kantor akuntan publik (KAP) beserta jaringan/asosiasi/aliannya meliputi:	188	SEOJK 16
	1. Nama dan alamat.		
	2. Periode penugasan.		
	3. Informasi jasa audit dan/atau non audit yang diberikan.		
	4. Biaya jasa (<i>fee</i>) audit dan/atau non audit untuk masing- masing penugasan yang diberikan selama tahun buku.		
	5. Dalam hal AP dan KAP beserta jaringan/asosiasi/ aliannya, yang ditunjuk tidak memberikan jasa non audit, maka diungkapkan mengenai informasi tersebut.		
	Pengungkapan informasi penggunaan jasa AP dan KAP beserta jaringan/asosiasi/aliannya dapat disajikan dalam bentuk tabel.		
Nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang.	Nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang pasar modal selain AP dan KAP.	188-192	SEOJK 16
Penghargaan dan Sertifikasi.	Informasi memuat antara lain:	193-202	SEOJK 9
	1. Nama penghargaan dan/atau sertifikasi (berskala nasional dan internasional).		
	2. Tahun perolehan penghargaan dan/atau sertifikasi.		
	3. Badan pemberi penghargaan dan/atau sertifikasi.		
	4. Masa berlaku (untuk sertifikasi).		
ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN ATAS KINERJA PERUSAHAAN			
Rencana Strategis Bank	1. Rencana jangka panjang (<i>corporate plan</i>). 2. Rencana jangka menengah dan pendek (<i>business plan</i>).	212-219	SEOJK 13 POJK 17
Tinjauan operasi per segmen usaha	Tinjauan operasi per segmen usaha sesuai dengan jenis industri Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai:		SEOJK 9 SEOJK 16
	1. Penjelasan masing-masing segmen usaha.	232-261	
	2. Kinerja per segmen usaha, antara lain:		
	a. Produksi, yang meliputi proses, kapasitas, dan perkembangannya.	233-262	
	b. Peningkatan/penurunan kapasitas produksi.	233-262	
	c. Penjualan/pendapatan usaha.	262-263	
	d. Profitabilitas.	262-263	

KRITERIA	PENJELASAN	HALAMAN	REGULASI
Uraian atas kinerja keuangan perusahaan	Kinerja keuangan komprehensif yang mencakup perbandingan kinerja keuangan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir (dalam bentuk narasi dan tabel), penjelasan tentang penyebab adanya perubahan dan dampak perubahan tersebut, paling sedikit mengenai:		SEOJK 9 SEOJK 16
	1. Aset lancar, aset tidak lancar, dan total aset.	266, 270-272	
	2. Liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang dan total liabilitas.	267-268, 272	
	3. Penanaman dana (investasi dan pemberian kredit/pembiayaan) dan total aset.	267, 270-271	
	4. Dana pihak ketiga dan sumber pendanaan lain.	267-268, 272	
	5. Ekuitas.	269, 273	
	6. Pendapatan/penjualan, beban, laba (rugi), penghasilan komprehensif lain, dan total laba (rugi) komprehensif.	274-277	
	7. Arus kas.	277-279	
	8. Suku bunga dasar kredit.	287	SEOJK 9
Analisis kualitas aset produktif dan rasio keuangan yang relevan.		287-289	SEOJK 9
Bahasan dan analisis tentang kemampuan membayar utang dan tingkat kolektibilitas piutang perusahaan, dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan sesuai dengan jenis industri perusahaan.	Penjelasan tentang:		SEOJK 16
	1. Kemampuan membayar utang, baik jangka pendek (likuiditas) maupun jangka panjang (solvabilitas).	280-281	
	2. Tingkat kolektibilitas piutang.	283	
Bahasan tentang struktur modal (<i>capital structure</i>) dan kebijakan manajemen atas struktur modal (<i>capital structure policy</i>).	Penjelasan atas:		SEOJK 16
	1. Rincian struktur modal (<i>capital structure</i>) yang terdiri dari utang berbasis bunga/sukuk dan ekuitas.	291-292	
	2. Kebijakan manajemen atas struktur modal (<i>capital structure policies</i>).	290	
	3. Dasar pemilihan kebijakan manajemen.	290	
Bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal (bukan ikatan pendanaan) pada tahun buku terakhir.	Penjelasan tentang:		SEOJK 16
	1. Nama pihak yang melakukan ikatan.	292	
	2. Tujuan dari ikatan tersebut.	293	
	3. Sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan-ikatan tersebut.	293	
	4. Mata uang yang menjadi denominasi.	293	
	5. Langkah-langkah yang direncanakan perusahaan untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait.	293	
	Catatan: apabila perusahaan tidak mempunyai ikatan terkait investasi barang modal pada tahun buku terakhir agar diungkapkan.		
Bahasan mengenai investasi barang modal yang direalisasikan pada tahun buku terakhir.	Penjelasan tentang:		SEOJK 9 SEOJK 16
	1. Jenis investasi barang modal.	293	
	2. Tujuan investasi barang modal.	293	
	3. Nilai investasi barang modal yang dikeluarkan pada tahun buku terakhir.	293	
	Catatan: apabila tidak terdapat realisasi investasi barang modal, agar diungkapkan.		
Uraian tentang prospek usaha perusahaan.	Prospek usaha dari Emiten atau Perusahaan Publik dikaitkan dengan kondisi industri, ekonomi secara umum dan pasar internasional disertai data pendukung kuantitatif dari sumber data yang layak dipercaya.	296-298	SEOJK 16



KRITERIA	PENJELASAN	HALAMAN	REGULASI
Informasi perbandingan antara target pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi), dan target atau proyeksi yang ingin dicapai untuk satu tahun mendatang.	Perbandingan antara target/proyeksi pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi), mengenai:		SEOJK 16
	1. Pendapatan/penjualan.	299-300	
	2. Laba (rugi).	299-300	
	3. Struktur modal (<i>capital structure</i>).	300	
	4. Pemasaran.	300	
	5. Pengembangan SDM.	300-301	
	6. Hal lainnya yang dianggap penting bagi Emiten atau Perusahaan Publik.	298-299	
	Target/proyeksi yang ingin dicapai Emiten atau Perusahaan Publik untuk 1 (satu) tahun mendatang, mengenai:		
	1. Pendapatan/penjualan.	302	
	2. Laba (rugi).	302	
	3. Struktur modal (<i>capital structure</i>).	302	
	4. Kebijakan dividen.	302-303	
	5. Pemasaran.	303	
	6. Pengembangan SDM.	304	
	7. Hal lainnya yang dianggap penting bagi Emiten atau Perusahaan Publik.	301-302	
Uraian tentang aspek pemasaran.	Aspek pemasaran atas barang dan/atau jasa Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai strategi pemasaran dan pangsa pasar.	219-231	SEOJK 9 SEOJK 16
Uraian mengenai dividen selama 2 (dua) tahun buku terakhir.	Uraian mengenai dividen selama 2 (dua) tahun buku terakhir, paling sedikit:		SEOJK 16
	1. Kebijakan dividen, antara lain memuat informasi persentase jumlah dividen yang dibagikan terhadap laba bersih.	305	
	2. Tanggal pembayaran dividen kas dan/atau tanggal distribusi dividen non kas.	305-306	
	3. Jumlah dividen per saham (kas dan/atau non kas).	305-306	
	4. Jumlah dividen per tahun yang dibayar.	305-306	
	Catatan: apabila tidak ada pembagian dividen, agar diungkapkan alasannya.		
Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum (dalam hal perusahaan masih diwajibkan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana)	Memuat uraian mengenai:		SEOJK 16
	1. Total perolehan dana.	306	
	2. Rencana penggunaan dana.	306	
	3. Rincian penggunaan dana.	306	
	4. Saldo dana.	306	
	5. Tanggal persetujuan RUPS/RUPO atas perubahan penggunaan dana (jika ada).	-	
	a. Dalam hal selama tahun buku, Emiten memiliki kewajiban menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana, maka diungkapkan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum secara kumulatif sampai dengan akhir tahun buku.		
	b. Dalam hal terdapat perubahan penggunaan dana sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, maka Emiten menjelaskan perubahan tersebut.		
	Catatan: apabila tidak memiliki informasi realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, agar diungkapkan.		

KRITERIA	PENJELASAN	HALAMAN	REGULASI
Informasi material (jika ada), antara lain mengenai investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan/peleburan usaha, akuisisi, restrukturisasi utang/modal, transaksi material, transaksi afiliasi, dan transaksi benturan kepentingan.	Memuat uraian mengenai:		
	a. Tanggal, nilai, dan objek transaksi.		
	b. Nama pihak yang melakukan transaksi.		
	c. Sifat hubungan afiliasi (jika ada).		
	d. Penjelasan mengenai kewajaran transaksi.		
	e. Pemenuhan ketentuan terkait.		
	f. Dalam hal terdapat hubungan afiliasi, selain mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud dalam angka a) sampai dengan angka f), Emiten atau Perusahaan Publik juga mengungkapkan informasi:		
	1) Pernyataan Direksi bahwa transaksi afiliasi telah melalui prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (<i>armslength principle</i>).		
	2) Peran Dewan Komisaris dan komite audit dalam melakukan prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (<i>arms length principle</i>).		
	g. Untuk transaksi afiliasi atau transaksi material yang merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan, ditambahkan penjelasan bahwa transaksi afiliasi atau transaksi material tersebut merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan. Dalam hal transaksi afiliasi atau transaksi material dimaksud telah diungkapkan dalam laporan keuangan tahunan, ditambahkan informasi mengenai rujukan pengungkapan dalam laporan keuangan tahunan tersebut.	307-315	SEOJK 16
	h. Untuk pengungkapan transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan yang merupakan hasil pelaksanaan transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan yang telah disetujui pemegang saham independen, ditambahkan informasi mengenai tanggal pelaksanaan RUPS yang menyetujui transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan tersebut.		SEOJK 16 SEOJK 13
	i. Dalam hal tidak terdapat transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.		
Uraian mengenai perubahan peraturan perundang-undangan terhadap perusahaan pada tahun buku terakhir.	Uraian memuat antara lain:		
	1. Nama peraturan perundang-undangan yang mengalami perubahan.	315-319	
	2. Dampaknya (kuantitatif dan/atau kualitatif) terhadap perusahaan (jika signifikan) atau pernyataan bahwa dampaknya tidak signifikan.	315-319	SEOJK 16
	Catatan: apabila tidak terdapat perubahan peraturan perundang-undangan pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan.		
Uraian mengenai perubahan kebijakan akuntansi yang diterapkan perusahaan pada tahun buku terakhir.	Uraian memuat antara lain:		
	1. Perubahan kebijakan akuntansi.	320-321	
	2. Alasan perubahan kebijakan akuntansi.	320	SEOJK 16
	3. Dampaknya secara kuantitatif terhadap laporan keuangan.	320-321	
	Catatan: Apabila tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan.		
Informasi Eksposur Risiko dan Permodalan.	Eksposur risiko dan permodalan meliputi laporan eksposur risiko dan permodalan periode tahunan sebagaimana diatur dalam bagian II Laporan publikasi eksposur risiko dan permodalan.	330-369	SEOJK 9



KRITERIA	PENJELASAN	HALAMAN	REGULASI
TATA KELOLA PERUSAHAAN			
RUPS.	Informasi mengenai keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku meliputi:	421-434	SEOJK 16
	a. Keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku yang direalisasikan pada tahun buku.		
	b. Keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku yang belum direalisasikan beserta alasan belum direalisasikan.		
	Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik menggunakan pihak independen dalam pelaksanaan RUPS untuk melakukan perhitungan suara, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.		
Direksi.	1. Tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi. Informasi mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi diuraikan dan dapat disajikan dalam bentuk tabel.	435-438	SEOJK 13 SEOJK 16 POJK 17
	2. Pernyataan bahwa Direksi memiliki pedoman atau piagam (<i>charter</i>) Direksi.	439-440	SEOJK 16
	3. Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat Direksi, rapat Direksi bersama Dewan Komisaris, dan tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat tersebut termasuk kehadiran dalam RUPS. Informasi tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat Direksi, rapat Direksi bersama Dewan Komisaris, atau RUPS dapat disajikan dalam bentuk tabel.	441-459	SEOJK 16
	4. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Direksi:	459-463	SEOJK 16
	a. Kebijakan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Direksi, termasuk program orientasi bagi anggota Direksi yang baru diangkat (jika ada).		
	b. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti anggota Direksi dalam tahun buku (jika ada).		
	5. Penilaian Direksi terhadap kinerja komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi pada tahun buku paling sedikit memuat:	464	SEOJK 16
	a. Prosedur penilaian kinerja.		
	b. Kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat.		
	Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.	504-505	SEOJK 13 POJK 17
	6. Kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih dari modal disetor, yang meliputi jenis dan jumlah lembar saham pada:		
	a. Bank yang bersangkutan. b. Bank lain. c. Lembaga keuangan bukan bank. d. Perusahaan lain yang berkedudukan baik di dalam maupun di luar negeri.		

KRITERIA	PENJELASAN	HALAMAN	REGULASI
Dewan Komisaris.	1. Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.	465	SEOJK 13 SEOJK 16 POJK 17
	2. Pernyataan bahwa Dewan Komisaris memiliki pedoman atau piagam (<i>charter</i>) Dewan Komisaris.	468	SEOJK 16
	3. Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris bersama Direksi dan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat tersebut termasuk kehadiran dalam RUPS. Informasi tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris bersama Direksi, atau RUPS dapat disajikan dalam bentuk tabel.	472-482	SEOJK 13 SEOJK 16
	4. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Dewan Komisaris:	482-485	SEOJK 16
	a. Kebijakan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Dewan Komisaris, termasuk program orientasi bagi anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat (jika ada).		
	b. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti anggota Dewan Komisaris dalam tahun buku (jika ada).		
	5. Penilaian kinerja Direksi dan Dewan Komisaris serta masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, paling sedikit memuat:	486-492	SEOJK 16
	a. Prosedur pelaksanaan penilaian kinerja.		
	b. Kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat.		
	c. Pihak yang melakukan penilaian.		
	6. Penilaian Dewan Komisaris terhadap kinerja Komite yang mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris pada tahun buku meliputi:	493-496	SEOJK 16
	a. Prosedur penilaian kinerja.		
	b. Kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat.		
Nominasi dan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris.	Paling sedikit memuat:		
	1. Prosedur nominasi, meliputi uraian singkat mengenai kebijakan dan proses nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	497	SEOJK 16
	2. Prosedur dan pelaksanaan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, antara lain:	498-501	SEOJK 16
	a. Prosedur penetapan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris.		
	b. Pengungkapan indikator untuk penetapan remunerasi Direksi.		
	c. Struktur remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris seperti, gaji, tunjangan, tantiem/bonus dan lainnya; dan Catatan: apabila tidak terdapat bonus kinerja, bonus non kinerja, dan opsi saham yang diterima setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi, agar diungkapkan.		
	d. Besarnya remunerasi masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel.		
Dewan pengawas syariah, bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana tertuang dalam anggaran dasar.	Paling sedikit memuat:	672-680	SEOJK 16
	a. Nama.		
	b. Dasar hukum pengangkatan Dewan Pengawas Syariah.		
	c. Periode penugasan Dewan Pengawas Syariah.		
	d. Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah.		
	e. Frekuensi dan cara pemberian nasihat dan saran serta pengawasan pemenuhan prinsip syariah di pasar modal terhadap Emiten atau Perusahaan Publik.		



KRITERIA	PENJELASAN	HALAMAN	REGULASI
Komite Audit.	1. Nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite.	513-514	SEOJK 16 POJK 17
	2. Usia.		
	3. Kewarganegaraan.		
	4. Riwayat pendidikan.		
	5. Riwayat jabatan, meliputi informasi:		
	a. Dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite.		
	b. Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada).		
	c. Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar emiten atau perusahaan publik.		
	6. Periode dan masa jabatan anggota komite audit.		
	7. Uraian tugas dan tanggung jawab.	510-511	SEOJK 13 SEOJK 16 POJK 17
	8. Pernyataan independensi komite audit.	515	
	9. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada).	516	
Komite atau fungsi nominasi dan remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.	10. Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat komite audit dan tingkat kehadiran anggota komite audit dalam rapat tersebut.	517-520	SEOJK 13 SEOJK 16 POJK 17
	11. Pelaksanaan kegiatan komite audit pada tahun buku sesuai dengan yang dicantumkan dalam pedoman atau piagam (<i>charter</i>) komite audit.	520-521	
	Paling sedikit memuat:	526-528	SEOJK 16 POJK 17
	1. Nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite.		
	2. Usia.		
	3. Kewarganegaraan.		
	4. Riwayat pendidikan.		
	5. Riwayat jabatan, meliputi informasi:		
	a. Dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite.		
	b. Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada).		
	c. Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik.		
	6. Periode dan masa jabatan anggota komite.		
	7. Pernyataan independensi komite.	528-529	
	8. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada).	529-530	
	9. Uraian tugas dan tanggung jawab.	522-524	
	10. Pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (<i>charter</i>).	524	
	11. Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota dalam rapat tersebut.	530-534	
	12. Uraian singkat pelaksanaan kegiatan pada tahun buku.	534-535	
	Dalam hal tidak dibentuk komite nominasi dan remunerasi, Emiten atau Perusahaan Publik cukup mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf i) sampai dengan huruf l) dan mengungkapkan:		
	1. Alasan tidak dibentuknya komite		
	2. Pihak yang melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi.		

KRITERIA	PENJELASAN	HALAMAN	REGULASI
Komite lain yang dimiliki Emiten atau Perusahaan Publik dalam rangka mendukung fungsi dan tugas Direksi (jika ada) dan/atau komite yang mendukung fungsi dan tugas Dewan Komisaris.	Paling sedikit memuat:	538-539	SEOJK 16 POJK 17
	1. Nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite.		
	2. Usia.		
	3. Kewarganegaraan.		
	4. Riwayat pendidikan.		
	5. Riwayat jabatan, meliputi informasi:		
	a. Dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite.		
	b. Rangkap jabatan, baik sebagai anggota dewan komisaris, anggota direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada).		
	c. Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar emiten atau perusahaan publik.		
	6. Periode dan masa jabatan anggota komite.		
	7. Pernyataan independensi komite.	539	
	8. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada).	540-541	
	9. Uraian tugas dan tanggung jawab.	536	
Sekretaris perusahaan.	10. Pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (<i>charter</i>) komite.	537	SEOJK 16
	11. Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat komite dan tingkat kehadiran anggota komite dalam rapat tersebut.	541-545	
	12. Uraian singkat pelaksanaan kegiatan komite pada tahun buku.	545-547	
	1. Nama.	548-549	
	2. Domisili.		
	3. Riwayat jabatan, meliputi:		
	a. Dasar hukum penunjukan sebagai sekretaris perusahaan.		
Unit Audit Internal.	b. Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar emiten atau perusahaan publik.		
	4. Riwayat pendidikan.		
	5. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti dalam tahun buku.	549-550	
	6. Uraian singkat pelaksanaan tugas sekretaris perusahaan pada tahun buku.	550-557	
	1. Nama kepala unit audit internal.	559	SEOJK 16 POJK 17
	2. Riwayat jabatan, meliputi:		
	a. Dasar hukum penunjukan sebagai kepala unit audit internal.		
	b. Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar emiten atau perusahaan publik.		
	3. Kualifikasi atau sertifikasi sebagai profesi audit internal (jika ada).		
	4. Jumlah pegawai (auditor internal) pada unit audit internal.	567	
	5. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti dalam tahun buku.	561-563	
	6. Struktur dan kedudukan unit audit internal.	558	
	7. Uraian tugas dan tanggung jawab.	559-560	
	8. Pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (<i>charter</i>) unit audit internal.	559	
	9. Uraian singkat pelaksanaan tugas unit audit internal pada tahun buku termasuk kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat dengan direksi, dewan komisaris, dan/ atau komite audit.	564-568	



KRITERIA	PENJELASAN	HALAMAN	REGULASI
Akuntan Publik.	1. Nama dan tahun akuntan publik yang melakukan audit laporan keuangan tahunan selama 5 tahun terakhir.	605	POJK 17
	2. Nama dan tahun Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit laporan keuangan tahunan selama 5 tahun terakhir.		
	3. Besarnya fee untuk masing-masing jenis jasa yang diberikan oleh Kantor Akuntan Publik pada tahun buku terakhir.		
	4. Jasa lain yang diberikan Kantor Akuntan Publik dan akuntan publik selain jasa audit laporan keuangan tahunan pada tahun buku terakhir.		
	Catatan: apabila tidak ada jasa lain dimaksud, agar diungkapkan.		
Uraian mengenai sistem pengendalian internal (<i>internal Control</i>) yang diterapkan oleh emiten atau perusahaan Publik.	1. Pengendalian keuangan dan operasional, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya.	606-608	SEOJK 13 SEOJK 16
	2. Tinjauan atas efektivitas sistem pengendalian internal.	609	
	3. Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas kecukupan sistem pengendalian internal.	610	SEOJK 16
Sistem manajemen risiko yang diterapkan oleh Emiten Atau Perusahaan Publik.	1. Gambaran umum mengenai sistem manajemen risiko Emiten atau Perusahaan Publik.	611-615	SEOJK 16 SEOJK 13
	2. Jenis risiko dan cara pengelolaannya.	616-624	
	3. Tinjauan atas efektivitas sistem manajemen risiko Emiten atau Perusahaan Publik.	626	SEOJK 16
	4. Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atau komite audit atas kecukupan sistem manajemen risiko.	626-627	
Fungsi kepatuhan.	Tingkat kepatuhan Bank terhadap seluruh ketentuan dan peraturan perundang-undangan serta pemenuhan komitmen dengan otoritas yang berwenang.	627-635	SEOJK 13 POJK 17
Perkara hukum yang berdampak material yang dihadapi Oleh emiten atau perusahaan publik, entitas anak, Anggota direksi dan anggota dewan komisaris (jika ada).	1. Pokok perkara/gugatan.	637-638	SEOJK 16
	2. Status penyelesaian perkara/gugatan.		
	3. Pengaruhnya terhadap kondisi emiten atau perusahaan publik.		
	4. Pengungkapan mengenai permasalahan hukum paling sedikit mencakup: a. jumlah permasalahan perdata dan permasalahan pidana yang dihadapi dan telah mendapat putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. b. jumlah permasalahan perdata dan permasalahan pidana yang dihadapi dan masih dalam proses penyelesaian.		SEOJK 13
	Catatan: dalam hal perusahaan, entitas anak, anggota Dewan Komisaris, dan anggota Direksi tidak memiliki perkara penting, agar diungkapkan.		
Informasi tentang sanksi administratif/ sanksi yang Dikenakan kepada emiten atau perusahaan publik, Anggota Dewan Komisaris dan anggota direksi, oleh Otoritas jasa keuangan dan otoritas lainnya pada tahun Buku (jika ada).		638	SEOJK 16
Informasi mengenai kode etik Emiten atau Perusahaan Publik.	1. Pokok-pokok kode etik.	650	SEOJK 16
	2. Bentuk sosialisasi kode etik dan upaya penegakannya	651	
	3. Pernyataan bahwa kode etik berlaku bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Emiten atau Perusahaan Publik	651	
Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank.	1. Komite Remunerasi a. Nama anggota, komposisi, tugas dan tanggung jawab. b. Jumlah rapat yang dilakukan. c. Remunerasi yang telah dibayarkan kepada anggota Komite Remunerasi selama 1 (satu) tahun.	597	POJK 45

KRITERIA	PENJELASAN	HALAMAN	REGULASI
	2. Proses penyusunan kebijakan Remunerasi yang meliputi: a. Tinjauan mengenai latar belakang dan tujuan kebijakan Remunerasi. b. Pelaksanaan kaji ulang atas kebijakan Remunerasi pada tahun sebelumnya, beserta perbaikannya. c. Mekanisme untuk memastikan bahwa Remunerasi bagi Pegawai di unit kontrol bersifat independen dari unit kerja yang diawasinya.	598	
	3. Cakupan kebijakan Remunerasi dan implementasinya per unit bisnis, per wilayah dan pada perusahaan anak atau kantor cabang yang berlokasi di luar negeri	598	
	4. Remunerasi dikaitkan dengan risiko yang meliputi: a. Jenis risiko utama (<i>key risk</i>) yang digunakan dalam menerapkan Remunerasi. b. Kriteria untuk menentukan jenis risiko utama, termasuk untuk risiko yang sulit diukur. c. Dampak penetapan risiko utama terhadap kebijakan Remunerasi yang Bersifat Variabel. d. Perubahan penentuan jenis risiko utama dibandingkan dengan tahun lalu beserta alasannya, apabila ada.	598	
	5. Pengukuran kinerja dikaitkan dengan Remunerasi yang meliputi: a. Tinjauan mengenai kebijakan Remunerasi yang dikaitkan dengan penilaian kinerja. b. Metode dalam mengaitkan Remunerasi individu dengan kinerja Bank, kinerja unit kerja dan kinerja individu. c. Uraian mengenai metode yang digunakan Bank untuk menyatakan bahwa kinerja yang disepakati tidak dapat tercapai sehingga perlu dilakukan penyesuaian atas remunerasi serta besarnya penyesuaian remunerasi jika kondisi tersebut terjadi.	598	
	6. Penyesuaian Remunerasi dikaitkan dengan Kinerja dan Risiko yang meliputi: a. Kebijakan mengenai Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan, besarnya, dan kriteria untuk menetapkan besaran tersebut. b. Kebijakan Bank mengenai Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan yang ditunda pembayarannya (<i>malus</i>), atau ditarik kembali apabila sudah dibayarkan (<i>clawback</i>).	598-599	
	7. Nama konsultan ekstern dan tugas konsultan terkait kebijakan Remunerasi, apabila Bank menggunakan jasa konsultan ekstern	599	
	8. Paket Remunerasi dan fasilitas yang diterima oleh Direksi dan Dewan Komisaris mencakup struktur Remunerasi dan rincian jumlah nominal.	599-600	
	9. Remunerasi yang Bersifat Variabel, meliputi: a. Bentuk Remunerasi yang Bersifat Variabel beserta alasan pemilihan bentuk tersebut. dan b. Penjelasan apabila terdapat perbedaan pemberian Remunerasi yang Bersifat Variabel di antara para Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Pegawai.	600	
	10. Jumlah Direksi, Dewan Komisaris dan Pegawai yang menerima Remunerasi yang Bersifat Variabel selama 1 (satu) tahun, dan total nominalnya.	600	
	11. Jabatan dan jumlah pihak yang menjadi <i>material risk takers</i> .	600	
	12. <i>Shares option</i> yang dimiliki Direksi, Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif.	600-603	
	13. Rasio gaji tertinggi dan terendah	603	
	14. Jumlah penerima dan jumlah total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang dijamin tanpa syarat akan diberikan oleh Bank kepada calon Direksi, calon Dewan Komisaris, dan/atau calon Pegawai selama 1 (satu) tahun pertama bekerja	603	
	15. Jumlah Pegawai yang terkena pemutusan hubungan kerja dan total nominal pesangon yang dibayarkan	603	
	16. Jumlah total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan, yang terdiri dari tunai dan/atau saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank.	603	
	17. Jumlah total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan yang dibayarkan selama 1 (satu) tahun.	603	



KRITERIA	PENJELASAN	HALAMAN	REGULASI
	18.Rincian jumlah Remunerasi yang diberikan dalam satu tahun meliputi: a. Remunerasi yang bersifat tetap maupun variabel. b. Remunerasi yang ditangguhkan dan tidak ditangguhkan. c. Bentuk Remunerasi yang diberikan secara tunai dan/atau saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank.	603	
	19.Informasi kuantitatif mengenai: a. Total sisa Remunerasi yang masih ditangguhkan baik yang terekspos penyesuaian implisit maupun eksplisit. b. Total pengurangan Remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian eksplisit selama periode laporan. c. Total pengurangan Remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian implisit selama periode laporan.	603	
Uraian singkat mengenai kebijakan pemberian Kompensasi jangka panjang berbasis kinerja kepada manajemen dan/ atau karyawan yang dimiliki oleh emiten Atau perusahaan publik (jika ada), antara lain berupa Program kepemilikan saham oleh manajemen (<i>management stock ownership program/MSOP</i>) dan/atau Program kepemilikan saham oleh karyawan (<i>employee Stock ownership program/ESOP</i>).	Dalam hal pemberian kompensasi berupa program Kepemilikan saham oleh manajemen (<i>management stock Ownership program/MSOP</i>) dan/atau program Kepemilikan saham oleh karyawan (<i>employee stock Ownership program/ESOP</i>). Informasi yang diungkapkan Paling sedikit memuat:	652-653	SEOJK 16
	1. Jumlah saham dan/atau opsi.		
	2. Jangka waktu pelaksanaan.		
	3. Persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak.		
	4. Harga pelaksanaan atau penentuan harga pelaksanaan.		
Uraian singkat mengenai kebijakan pengungkapan Informasi mengenai	1. Kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris paling lambat 3 (tiga) hari kerja Setelah terjadinya kepemilikan atau setiap Perubahan kepemilikan atas saham perusahaan Terbuka.	505-507	SEOJK 16
	2. Pelaksanaan atas kebijakan dimaksud.		
Uraian mengenai sistem pelaporan pelanggaran (<i>whistleblowing system</i>) di Emiten atau Perusahaan Publik.	1. Cara penyampaian laporan pelanggaran.	653	SEOJK 16
	2. Perlindungan bagi pelapor.	653	
	3. Penanganan pengaduan.	653-660	
	4. Pihak yang mengelola pengaduan.	661	
	5. Hasil dari penanganan pengaduan, paling sedikit:	661	
	a. Jumlah pengaduan yang masuk dan diproses Dalam tahun buku.		
	b. Tindak lanjut pengaduan.		
	Dalam hal emiten atau perusahaan publik tidak memiliki Sistem pelaporan pelanggaran (<i>whistleblowing system</i>), Maka diungkapkan mengenai hal tersebut.		
Uraian mengenai kebijakan anti korupsi Emiten atau Perusahaan Publik.	1. Program dan prosedur yang dilakukan dalam Mengatasi praktik korupsi, balas jasa (<i>kickbacks</i>), <i>Fraud</i> , suap dan/atau gratifikasi dalam Emiten atau Perusahaan Publik.	662-666	SEOJK 16 POJK 17
	2. Pelatihan/sosialisasi anti korupsi kepada karyawan Emiten atau Perusahaan Publik.	666-668	
	Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki Kebijakan anti korupsi, maka dijelaskan alasan tidak Dimilikinya kebijakan dimaksud.		
Penanganan benturan kepentingan		670	SEOJK 13 POJK 17
Penyediaan dana kepada pihak terkait (<i>related party</i>) dan penyediaan dana besar (<i>large exposure</i>).	Informasi yang perlu diungkap adalah jumlah total baki debit penyediaan dana kepada pihak terkait (<i>related party</i>) dan kepada debitur inti (individu atau grup) per posisi laporan	669-670	SEOJK 13
Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank yang belum diungkap dalam laporan lain.		670	SEOJK 13 POJK 17
Informasi lain yang terkait dengan Tata Kelola Bank, antara lain berupa intervensi pemilik, perselisihan intern atau permasalahan yang timbul sebagai dampak kebijakan remunerasi pada Bank.		670	SEOJK 13

KRITERIA	PENJELASAN	HALAMAN	REGULASI
Jumlah Penyimpangan (<i>Internal Fraud</i>).	Pengungkapan mengenai penyimpangan (<i>internal fraud</i>) paling sedikit mencakup: 1. Jumlah penyimpangan (<i>internal fraud</i>) yang telah diselesaikan. 2. Jumlah penyimpangan (<i>internal fraud</i>) yang sedang dalam proses penyelesaian di internal bank. 3. Jumlah penyimpangan (<i>internal fraud</i>) yang belum diupayakan penyelesaian di internal bank. 4. Jumlah penyimpangan (<i>internal fraud</i>) yang telah ditindaklanjuti melalui proses hukum.	669	SEOJK 13
Pembelian Kembali (<i>Buy Back</i>) Saham dan/atau Obligasi Bank.	1. Kebijakan dalam melakukan pembelian kembali (<i>buy back</i>) saham atau obligasi Bank. 2. Jumlah lembar saham dan/atau obligasi yang dibeli kembali. 3. Harga pembelian kembali per lembar saham dan/atau obligasi. 4. Peningkatan laba per lembar saham dan/atau obligasi.	670	SEOJK 13
Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan/atau Kegiatan Politik Selama Periode Pelaporan.	Pengungkapan mengenai pemberian dana untuk kegiatan sosial dan/atau kegiatan politik paling sedikit meliputi pihak penerima dana dan jumlah dana yang diberikan.	669	SEOJK 13
Penerapan keuangan berkelanjutan, termasuk penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan		670	POJK 17
Penerapan atas pedoman tata kelola Perusahaan Terbuka bagi Emiten yang menerbitkan efek bersifat ekuitas atau Perusahaan Publik.	1. Pernyataan mengenai rekomendasi yang telah dilaksanakan dan/atau	684-692	SEOJK 16
	2. Penjelasan atas rekomendasi yang belum dilaksanakan, disertai alasan dan alternatif pelaksanaannya (jika ada).		
	Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel.		
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK			
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.	1. Informasi yang diungkapkan dalam bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan Laporan Keberlanjutan (<i>Sustainability Report</i>) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, paling sedikit memuat:	710-732	SEOJK 16
	a) Penjelasan strategi keberlanjutan.		
	b) Ikhtisar aspek keberlanjutan (ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup).		
	c) Profil singkat Emiten atau Perusahaan Publik.		
	d) Penjelasan Direksi.		
	e) Tata kelola keberlanjutan.		
	f) Kinerja keberlanjutan.		
	g) Verifikasi tertulis dari pihak independen, jika ada.		
	h) Lembar umpan balik (<i>feedback</i>) untuk pembaca, jika ada.		
	i) Tanggapan Emiten atau Perusahaan Publik terhadap umpan balik laporan tahun sebelumnya.		
	2. Laporan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada angka 1), harus disusun sesuai Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Keberlanjutan (<i>Sustainability Report</i>) Bagi Emiten dan Perusahaan Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.		
	3. Informasi Laporan Keberlanjutan (<i>Sustainability Report</i>) pada angka 1) dapat:		
	a) Diungkapkan pada bagian lain yang relevan di luar bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan, seperti penjelasan Direksi terkait Laporan Keberlanjutan diungkapkan dalam bagian terkait Laporan Direksi; dan/atau		
	b) Merujuk pada bagian lain di luar bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan tetap mengacu pada Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Keberlanjutan (<i>Sustainability Report</i>) Bagi Emiten dan Perusahaan Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, seperti profil Emiten atau Perusahaan Publik.		



KRITERIA	PENJELASAN	HALAMAN	REGULASI
	4. Laporan Keberlanjutan (<i>Sustainability Report</i>) sebagaimana dimaksud pada angka 1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Tahunan namun dapat disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan. 5. Dalam hal Laporan Keberlanjutan disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan, informasi yang diungkapkan dalam Laporan Keberlanjutan dimaksud harus: a) Memuat seluruh informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1); dan b) Disusun sesuai Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Keberlanjutan (<i>Sustainability Report</i>) Bagi Emiten dan Perusahaan Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini. 6. Dalam hal Laporan Keberlanjutan disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan, maka dalam bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan memuat informasi bahwa informasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan telah diungkapkan dalam Laporan Keberlanjutan yang disajikan secara terpisah dari Laporan Tahunan. 7. Penyampaian Laporan Keberlanjutan (<i>Sustainability Report</i>) yang disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan harus disampaikan bersamaan dengan penyampaian Laporan Tahunan.		

Keterangan

- SEOJK 16** : Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.
- SEOJK 9** : Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 9/SEOJK.03/2020 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional.
- SEOJK 13** : Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.
- POJK 45** : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum.
- POJK 17** : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 17 Tahun 2023 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum

Halaman ini Sengaja Dikosongkan

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2023

dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
beserta laporan auditor independen/

Financial statements

As of December 31, 2023

and for the year then ended

with independent auditor's report

**SURAT PERNYATAAN DEWAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2023
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk**

**BOARD OF DIRECTORS' STATEMENT
REGARDING
THE RESPONSIBILITY FOR
THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2023 AND
FOR THE YEAR THEN ENDED
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk**

Kami, yang bertanda tangan di bawah ini:

We, the undersigned below:

1. Nama	Nixon L.P. Napitupulu	Name
Alamat kantor	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Jl. Gajah Mada No. 1 Jakarta 10130	Office address
Alamat domisili atau sesuai KTP	Jl. Wijaya I No. 13 Kel. Petogogan, Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan	Domicile address or address according to ID
Nomor telepon	021-6346762	Telephone number
Jabatan	Direktur Utama/President Director	Title
2. Nama	Nofry Rony Poetra	Name
Alamat kantor	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Jl. Gajah Mada No. 1 Jakarta 10130	Office address
Alamat domisili atau sesuai KTP	Jl. Taman Patra XII No. 17 Kel. Kuningan Timur, Kec. Setiabudi Jakarta Selatan	Domicile address or address according to ID
Nomor telepon	021-5264529	Telephone number
Jabatan	Direktur Finance/Director of Finance	Title

menyatakan bahwa:

declare that:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk;	1. We are responsible for the preparation and presentation of the financial statements of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk;
2. Laporan keuangan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;	2. The financial statements of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk telah diungkapkan secara lengkap dan benar; dan	3. a. All information in the financial statements of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk have been fully disclosed in a complete and truthful manner; and
b. Laporan keuangan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;	b. The financial statements of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk do not contain any incorrect information or material fact, nor do they omit any information or material fact;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.	4. We are responsible for the internal control system of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement is made truthfully.

Jakarta, 12 Februari 2024/Jakarta, February 12, 2024

Nixon L.P. Napitupulu
Direktur Utama/President Director

Nofry Rony Poetra
Direktur Finance/Director of Finance

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2023 AND
FOR THE YEAR THEN ENDED
WITH INDEPENDENT AUDITORS' REPORT**

Daftar Isi

Table of Contents

	<u>Halaman/Page</u>	
Laporan Auditor Independen		<i>Independent Auditor's Report</i>
Laporan Posisi Keuangan.....	1 - 6	<i>Statement of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprensif Lain	7 - 9	<i>Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Ekuitas	10 - 11	<i>Statement of Changes in Equity</i>
Laporan Arus Kas	12 - 14	<i>Statement of Cash Flows</i>
Catatan Atas Laporan Keuangan	15 - 287	<i>Notes to the Financial Statements</i>

Laporan Auditor Independen

Laporan No. 00048/2.1032/AU.1/07/1681-1/1/II/2024

Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. ("Bank") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2023, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Bank tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"). Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Bank berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini kami.

Independent Auditor's Report

Report No. 00048/2.1032/AU.1/07/1681-1/1/II/2024

*The Shareholders, the Board of Commissioners, and the Board of Directors
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.*

Opinion

We have audited the accompanying financial statements of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (the "Bank"), which comprise the statement of financial position as of December 31, 2023, and the statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity, and statement of cash flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including material accounting policy information.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Bank as of December 31, 2023, and its financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants ("IICPA"). Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Bank in accordance with the ethical requirements relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with such requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00048/2.1032/AU.1/07/1681-1/1/II/2024 (lanjutan)

Hal audit utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan periode kini. Hal audit utama tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan terkait, dan kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut. Untuk hal audit utama di bawah ini, penjelasan kami tentang bagaimana audit kami merespons hal tersebut disampaikan dalam konteks tersebut.

Kami telah memenuhi tanggung jawab yang diuraikan dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami, termasuk sehubungan dengan hal audit utama yang dikomunikasikan di bawah ini. Oleh karena itu, audit kami mencakup pelaksanaan prosedur yang dirancang untuk merespons penilaian kami atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan terlampir. Hasil prosedur audit kami, termasuk prosedur yang dilakukan untuk merespons hal audit utama di bawah ini, menyediakan basis bagi opini kami atas laporan keuangan terlampir.

Cadangan kerugian penurunan nilai atas kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah

Penjelasan atas hal audit utama:

Seperti yang dijelaskan dalam Catatan 11 atas laporan keuangan terlampir, pada tanggal 31 Desember 2023, cadangan kerugian penurunan nilai atas kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah adalah sebesar Rp15.591.964 juta. Kebijakan akuntansi signifikan untuk cadangan kerugian penurunan nilai atas kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah diungkapkan dalam Catatan 2f atas laporan keuangan terlampir. Kami berfokus pada area ini karena nilai tercatat atas kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah dan cadangan kerugian penurunan nilai atas kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah adalah signifikan terhadap laporan keuangan terlampir.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00048/2.1032/AU.1/07/1681-1/1/II/2024 (continued)

Key audit matter

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the financial statements of the current period. Such key audit matters were addressed in the context of our audit of the financial statements taken as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on such key audit matters. For the key audit matter below, our description of how our audit addressed such key audit matter is provided in such context.

We have fulfilled the responsibilities described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements paragraph of our report, including in relation to key audit matter communicated below. Accordingly, our audit included the performance of procedures designed to respond to our assessment of the risks of material misstatement of the accompanying financial statements. The results of our audit procedures, including the procedures performed to address the key audit matter below, provide the basis for our opinion on the accompanying financial statements.

Allowance for impairment losses on loans and sharia financing/receivables

Description of the key audit matter:

As described in Note 11 to the accompanying financial statements, as of December 31, 2023, the allowance for impairment losses on loans and sharia financing/receivables was Rp15,591,964 million. The significant accounting policies of allowance for impairment losses on loans and sharia financing/receivables are disclosed in Note 2f to the accompanying financial statements. We focused on this area due to the carrying value of loans and sharia financing/receivables and the allowance for impairment losses on loans and sharia financing/receivables are significant to the accompanying financial statements.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00048/2.1032/AU.1/07/1681-1/1/II/2024 (lanjutan)

Hal audit utama (lanjutan)

Cadangan kerugian penurunan nilai atas kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah (lanjutan)

Penjelasan atas hal audit utama: (lanjutan)

Penentuan cadangan kerugian penurunan nilai memerlukan pertimbangan dan memiliki ketidakpastian estimasi termasuk dalam penentuan model untuk menghitung cadangan kerugian penurunan nilai, identifikasi eksposur kredit yang mengalami penurunan kualitas kredit yang signifikan, penentuan asumsi yang digunakan dalam model perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai (untuk eksposur yang dinilai secara individu atau kolektif), termasuk faktor ekonomi makro berorientasi masa depan.

Respons audit:

Prosedur audit kami dalam merespons hal audit utama tersebut di atas mencakup, antara lain: menguji pengendalian utama atas pemberian kredit, melakukan penilaian kualitas kredit internal secara regular, melakukan pencatatan dan pengawasan kredit yang diberikan, piutang murabahah, piutang istishna, pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, dan pinjaman qardh, serta pengendalian umum atas sistem perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai dan pengendalian aplikasi atas kelengkapan dan keakuratan aliran data dari sistem asal ke sistem perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai. Kami juga memperoleh pemahaman dan menilai metodologi pengukuran penurunan nilai, melakukan validasi model cadangan kerugian penurunan nilai, data masukan, dasar, dan asumsi yang digunakan oleh Bank dalam menghitung cadangan kerugian penurunan nilai, serta menguji tiga tahapan kualitas kredit portofolio sesuai dengan kriteria tingkatan (*staging*) yang disusun oleh Bank untuk kredit yang diberikan, menguji apakah pengalaman historis mewakili keadaan saat ini dan kerugian terkini yang terjadi dalam portofolio, serta menilai kewajaran atas penyesuaian asumsi berorientasi masa depan, analisis faktor ekonomi makro, dan beberapa skenario probabilitas tertimbang untuk kredit yang diberikan.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00048/2.1032/AU.1/07/1681-1/1/II/2024 (continued)

Key audit matter (continued)

Allowance for impairment losses on loans and sharia financing/receivables (continued)

Description of the key audit matter: (continued)

Determination of allowance for impairment losses requires judgement and is subject to estimation uncertainty which includes determining the model to calculate allowance for impairment losses, identification of credit exposures with significant deterioration in credit quality, and determining assumptions used in the allowance for impairment losses calculation models (for exposures assessed on an individual or collective basis), including forward-looking macroeconomics factors.

Audit response:

Our audit procedures address the key audit matter mentioned above included, among others: tested the key controls over the origination, segmentation, regular internal credit quality assessments, recording and monitoring of the loans, murabahah receivables, istishna receivables, mudharabah financing, musyarakah financing, and funds of qardh, and general controls over the allowance for impairment losses system and the application controls over the completeness and accuracy of data flows from source systems to the allowance for impairment losses system. We also obtained understanding and assessed impairment measurement methodologies, validation of allowance for impairment losses models, and inputs, bases and assumptions used by the Bank in calculating the allowance for impairment losses, and tested the classification into three-stage credit quality of loan portfolios in accordance with staging criteria developed by the Bank for loans, tested whether historical experience is representative of current circumstances and of the recent losses incurred in the portfolios, and assessed reasonableness of forward-looking adjustments, macroeconomic factor analysis, and probability-weighted multiple scenarios for loans.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00048/2.1032/AU.1/07/1681-1/1/II/2024 (lanjutan)

Hal audit utama (lanjutan)

Cadangan kerugian penurunan nilai atas kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah (lanjutan)

Respons audit: (lanjutan)

Untuk cadangan kerugian penurunan nilai yang dinilai secara individual, kami menguji sampel kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah untuk mengevaluasi identifikasi secara tepat waktu oleh Bank atas eksposur yang mengalami penurunan kualitas kredit yang signifikan atau yang telah mengalami penurunan nilai; untuk kasus-kasus di mana penurunan nilai telah diidentifikasi, kami menilai asumsi Bank atas arus kas masa depan ekspektasian, termasuk nilai agunan yang dapat direalisasikan berdasarkan informasi pasar yang tersedia atau penilaian yang dilakukan oleh penilai independen. Kami juga memeriksa keakurasian perhitungan jumlah cadangan kerugian penurunan nilai dengan melakukan perhitungan ulang atas keseluruhan portofolio yang penurunan nilainya dinilai secara kolektif dan melakukan perhitungan ulang atas penurunan nilai yang dinilai secara individual berdasarkan sampel, menilai apakah pengungkapan di laporan keuangan cukup dan secara memadai mencerminkan eksposur Bank terhadap risiko kredit, dan melibatkan pakar auditor internal kami untuk membantu kami dalam melakukan prosedur-prosedur di atas ketika keahlian spesifik mereka diperlukan.

Informasi lain

Manajemen bertanggung jawab atas informasi lain. Informasi lain terdiri dari informasi yang tercantum dalam Laporan Tahunan selain laporan keuangan terlampir dan laporan auditor independen kami. Laporan Tahunan diharapkan akan tersedia bagi kami setelah tanggal laporan auditor independen ini.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00048/2.1032/AU.1/07/1681-1/1/II/2024 (continued)

Key audit matter (continued)

Allowance for impairment losses on loans and sharia financing/receivables (continued)

Audit response: (continued)

With respect to individually assessed allowance for impairment losses, we tested a sample of loans and sharia financing/receivables to evaluate the timely identification by the Bank of exposures with significant deterioration in credit quality or those which have been impaired; for cases where impairment has been identified, assessed the Bank's assumptions on the expected future cash flows, including the value of realizable collateral based on available market information or valuation prepared by independent valuer. We also checked the accuracy of the calculation of the allowance for impairment losses amount by recalculating the collective impairment assessment for the entire portfolio and recalculating the individual impairment assessment on a sample basis, assessed whether the financial statement disclosures are adequately and appropriately reflecting the Bank's exposures to credit risk, and involved our auditor's internal expert to assist us in the performance of the above procedures where their specific expertise was required.

Other information

Management is responsible for the other information. Other information comprises the information included in the Annual Report other than the accompanying financial statements and our independent auditor's report thereon. The Annual Report is expected to be made available to us after the date of this independent auditor's report.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00048/2.1032/AU.1/07/1681-1/1/II/2024 (lanjutan)

Informasi lain (lanjutan)

Opini kami atas laporan keuangan terlampir tidak mencakup Laporan Tahunan, dan oleh karena itu, kami tidak menyatakan bentuk keyakinan apapun atas Laporan Tahunan tersebut.

Sehubungan dengan audit kami atas laporan keuangan terlampir, tanggung jawab kami adalah untuk membaca Laporan Tahunan ketika tersedia dan, dalam melaksanakannya, mempertimbangkan apakah Laporan Tahunan mengandung ketidakkonsistensian material dengan laporan keuangan terlampir atau pemahaman yang kami peroleh selama audit, atau mengandung kesalahan penyajian material.

Ketika kami membaca Laporan Tahunan, jika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu kesalahan penyajian material di dalamnya, kami diharuskan untuk mengkomunikasikan hal tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan melakukan tindakan yang tepat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tanggung jawab manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terhadap laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00048/2.1032/AU.1/07/1681-1/1/II/2024 (continued)

Other information (continued)

Our opinion on the accompanying financial statements does not cover the Annual Report, and accordingly, we do not express any form of assurance on the annual report.

In connection with our audit of the accompanying financial statements, our responsibility is to read the Annual Report when it becomes available and, in doing so, consider whether the Annual Report is materially inconsistent with the accompanying financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

When we read the Annual Report, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance and take appropriate actions based on the applicable laws and regulations.

Responsibilities of management and those charged with governance for the financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00048/2.1032/AU.1/07/1681-1/1/II/2024 (lanjutan)

Tanggung jawab manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terhadap laporan keuangan (lanjutan)

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Bank dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Bank atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Bank.

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor independen yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan mempengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00048/2.1032/AU.1/07/1681-1/1/II/2024 (continued)

Responsibilities of management and those charged with governance for the financial statements (continued)

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Bank's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern, and using the going concern basis of accounting, unless management either intends to liquidate the Bank or to cease its operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Bank's financial reporting process.

Auditor's responsibilities for the audit of the financial statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements taken as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an independent auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing established by the IICPA will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00048/2.1032/AU.1/07/1681-1/1/II/2024 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan (lanjutan)

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya suatu kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi daripada yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Bank.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00048/2.1032/AU.1/07/1681-1/1/II/2024 (continued)

Auditor's responsibilities for the audit of the financial statements (continued)

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing established by the IICPA, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to such risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Bank's internal control.*
- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00048/2.1032/AU.1/07/1681-1/1/II/2024 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan (lanjutan)

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga: (lanjutan)

- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Bank untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor independen kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor independen kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Bank tidak dapat mempertahankan kelangsungan usahanya.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00048/2.1032/AU.1/07/1681-1/1/II/2024 (continued)

Auditor's responsibilities for the audit of the financial statements (continued)

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing established by the IICPA, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also: (continued)

- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Bank's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our independent auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusion is based on the audit evidence obtained up to the date of our independent auditor's report. However, future events or conditions may cause the Bank to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure, and contents of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00048/2.1032/AU.1/07/1681-
1/1/II/2024 (lanjutan)

**Tanggung jawab auditor terhadap audit atas
laporan keuangan (lanjutan)**

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan kepada pihak tersebut seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan jika relevan, pengamanan terkait.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama tersebut dalam laporan auditor independen kami kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal audit utama tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal audit utama tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan auditor independen kami karena konsekuensi yang merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

Independent Auditor's Report (continued)

Report No. 00048/2.1032/AU.1/07/1681-
1/1/II/2024 (continued)

**Auditor's responsibilities for the audit of the
financial statements (continued)**

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe such key audit matters in our Independent auditor's report unless laws or regulation preclude public disclosure about such key audit matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a key audit matter should not be communicated in our Independent auditor's report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

KAP Purwantono, Sungkoro & Surja



Christophorus Alvin Kossim

Registrasi Akuntan Publik No. AP.1681/Public Accountant Registration No. AP. 1681

12 Februari 2024/February 12, 2024



PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
As of December 31, 2023
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

	31 Desember/ December 31, 2023	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 31, 2022	
ASET				ASSETS
KAS	2.127.489	2a,2e,4	1.661.533	CASH
GIRO PADA BANK INDONESIA	18.145.761	2a,2e, 2g,5	25.416.941	CURRENT ACCOUNTS WITH BANK INDONESIA
GIRO PADA BANK LAIN		2a,2d		CURRENT ACCOUNTS WITH OTHER BANKS
Pihak ketiga	1.153.949	2e,2f,2g	963.935	Third parties
Pihak berelasi	1.049.449	6,43	508.322	Related parties
	2.203.398		1.472.257	
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.804)		(1.747)	Allowance for impairment losses
	2.201.594		1.470.510	
PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN		2a,2d 2e,2h,7,43		PLACEMENTS WITH BANK INDONESIA AND OTHER BANKS
Pihak ketiga	30.561.061		12.975.894	Third parties
Pihak berelasi	61		61	Related parties
	30.561.122		12.975.955	
EFEK-EFEK		2a,2d,		SECURITIES
Pihak ketiga	1.454.768	2e,2f,2i,	873.109	Third parties
Pihak berelasi	3.851.105	8,43	850.059	Related parties
	5.305.873		1.723.168	
Cadangan kerugian penurunan nilai	(22.903)		(2.399)	Allowance for impairment losses
	5.282.970		1.720.769	
OBLIGASI PEMERINTAH		2a,2d,		GOVERNMENT BONDS
Pihak berelasi	35.893.929	2e,2i,9,43	51.964.973	Related parties
EFEK-EFEK YANG DIBELI DENGAN JANJI DIJUAL KEMBALI		2e		SECURITIES PURCHASED UNDER AGREEMENT TO RESELL
Pihak ketiga	-	2f, 2u,10	1.434.190	Third parties

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (continued)
As of December 31, 2023
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

	31 Desember/ December 31, 2023	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 31, 2022	
ASET (lanjutan)				ASSETS (continued)
KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN/ PIUTANG SYARIAH		2d,2e,2f, 2j,2k,11,43		LOANS AND SHARIA FINANCING/RECEIVABLES
Kredit yang diberikan				Loans
Pihak ketiga	268.898.377		247.217.823	Third parties
Pihak berelasi	27.685.483		19.439.742	Related parties
	296.583.860		266.657.565	
Cadangan kerugian penurunan nilai	(14.191.536)		(14.104.914)	Allowance for impairment losses
	282.392.324		252.552.651	
Pembiayaan/piutang syariah				Sharia financing/receivables
Pihak ketiga	37.027.078		31.367.082	Third parties
Pihak berelasi	87.203		257.057	Related parties
	37.114.281		31.624.139	
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.400.428)		(1.570.009)	Allowance for impairment losses
	35.713.853		30.054.130	
	318.106.177		282.606.781	
TAGIHAN DERIVATIF		2e		DERIVATIVE RECEIVABLES
Pihak ketiga	32.176	2an,12	103.939	Third parties
TAGIHAN AKSEPTASI		2d,2e,2f 2l,13,43		ACCEPTANCES RECEIVABLES
Pihak ketiga	475.821		289.206	Third parties
Pihak berelasi	68.746		131.356	Related parties
	544.567		420.562	
Cadangan kerugian penurunan nilai	(23.876)		(136)	Allowance for impairment losses
	520.691		420.426	
ASET TETAP		2n,2o, 14,34		PREMISES AND EQUIPMENT
Biaya perolehan/nilai revaluasi	12.953.746		10.599.848	Cost/revaluation value
Akumulasi penyusutan	(4.835.934)		(4.246.045)	Accumulated depreciation
	8.117.812		6.353.803	
BUNGA YANG MASIH AKAN DITERIMA	11.526.687	2e,15	10.750.302	INTEREST RECEIVABLES
ASET PAJAK TANGGUHAN - NETO	2.998.282	2ag,38	2.915.428	DEFERRED TAX ASSETS - NET
ASET LAIN-LAIN	3.235.046	2e,2p, 2q,2am,16	2.352.762	OTHER ASSETS
TOTAL ASET	438.749.736		402.148.312	TOTAL ASSETS

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (continued)
As of December 31, 2023
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

	31 Desember/ December 31, 2023	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 31, 2022	
LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS				LIABILITIES, TEMPORARY SYIRKAH FUNDS AND EQUITY
LIABILITAS				LIABILITIES
LIABILITAS SEGERA	3.277.514	2e,2r,17	3.205.358	LIABILITIES DUE IMMEDIATELY
SIMPANAN DARI NASABAH		2d,2e,2s,43 18		DEPOSITS FROM CUSTOMERS
Giro				Demand deposits
Pihak ketiga	20.957.283		17.636.481	Third parties
Pihak berelasi	108.412.008		87.264.437	Related parties
	129.369.291		104.900.918	
Giro Wadiah		18		Wadiah demand deposits
Pihak ketiga	2.402.428		1.783.134	Third parties
Pihak berelasi	11.037.037		6.841.675	Related parties
	13.439.465		8.624.809	
	142.808.756		113.525.727	
Tabungan		19		Saving deposits
Pihak ketiga	37.029.999		35.656.990	Third parties
Pihak berelasi	692.162		525.339	Related parties
	37.722.161		36.182.329	
Tabungan Wadiah		19		Wadiah saving deposits
Pihak ketiga	1.274.456		1.192.775	Third parties
Pihak berelasi	2.136		943	Related parties
	1.276.592		1.193.718	
	38.998.753		37.376.047	
Deposito berjangka		20		Time deposits
Pihak ketiga	63.976.056		66.808.185	Third parties
Pihak berelasi	76.717.583		79.389.842	Related parties
	140.693.639		146.198.027	
Total simpanan dari nasabah	322.501.148		297.099.801	Total deposits from customers

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (continued)
As of December 31, 2023
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

	31 Desember/ December 31, 2023	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 31, 2022	
LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS (lanjutan)				LIABILITIES, TEMPORARY SYIRKAH FUNDS AND EQUITY (continued)
SIMPANAN DARI BANK LAIN		2e,2t,		DEPOSITS FROM OTHER BANKS
Pihak ketiga	91.312	21	136.408	Third parties
LIABILITAS AKSEPTASI		2d,2e,2l		ACCEPTANCES PAYABLE
Pihak ketiga	320.522	22,43	302.037	Third parties
Pihak berelasi	224.045		118.525	Related parties
	544.567		420.562	
SURAT-SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN		1c,2d, 2e,		SECURITIES ISSUED
Pihak ketiga	2.403.573	2v,23,43	4.297.252	Third parties
Pihak berelasi	5.868.525		4.355.008	Related parties
	8.272.098		8.652.260	
PINJAMAN YANG DITERIMA		2d,2e,2w,		FUND BORROWINGS
Pihak ketiga	11.308.799	24,43	7.365.320	Third parties
Pihak berelasi	22.453.290		17.455.685	Related parties
	33.762.089		24.821.005	
BUNGA YANG MASIH HARUS DIBAYAR	647.496	2e,26	629.366	INTEREST PAYABLE
ESTIMASI KERUGIAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI	3.580	2d,2e,2af 27,39,43	4.719	ESTIMATED LOSSES ON COMMITMENTS AND CONTINGENCIES
LIABILITAS IMBALAN KERJA DAN LAIN-LAIN	2.951.848	2d,2e,2ae 28,40,43	7.248.985	EMPLOYEE BENEFITS AND OTHER LIABILITIES
PINJAMAN SUBORDINASI DAN EFEK-EFEK SUBORDINASI		2d,2e,2x		SUBORDINATED LOAN AND SECURITIES
Pihak ketiga	4.612.840	25,43	4.658.242	Third parties
Pihak berelasi	4.499.997		4.499.977	Related parties
	9.112.837		9.158.219	
TOTAL LIABILITAS	381.164.489		351.376.683	TOTAL LIABILITIES

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (continued)
As of December 31, 2023
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

	31 Desember/ December 31, 2023	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 31, 2022	
LIABILITAS, DANA SYIRKAH				LIABILITIES, TEMPORARY
TEMPORER DAN EKUITAS (lanjutan)				SYIRKAH FUNDS AND
				EQUITY (continued)
DANA SYIRKAH TEMPORER				TEMPORARY SYIRKAH FUNDS
SIMPANAN NASABAH		2d,2e,2aa		DEPOSITS FROM CUSTOMERS
Giro <i>Mudharabah</i>		43,18		<i>Mudharabah current accounts</i>
Pihak ketiga	712.587		468.889	<i>Third parties</i>
Pihak berelasi	13.474		11.897	<i>Related parties</i>
	726.061		480.786	
Tabungan <i>Mudharabah</i>		19		<i>Mudharabah saving deposits</i>
Pihak ketiga	5.331.249		4.730.686	<i>Third parties</i>
Pihak berelasi	141.993		88.427	<i>Related parties</i>
	5.473.242		4.819.113	
Deposito berjangka <i>Mudharabah</i>		20		<i>Mudharabah time deposits</i>
Pihak ketiga	11.975.188		11.886.366	<i>Third parties</i>
Pihak berelasi	8.908.369		7.637.191	<i>Related parties</i>
	20.883.557		19.523.557	
Total simpanan nasabah	27.082.860		24.823.456	<i>Total deposits from customers</i>
SIMPANAN DARI BANK LAIN		2e,2aa		DEPOSITS FROM OTHER BANKS
Giro <i>Mudharabah</i>		21		<i>Mudharabah current accounts</i>
Pihak ketiga	4.154		56	<i>Third parties</i>
Tabungan <i>Mudharabah</i>		21		<i>Mudharabah saving deposits</i>
Pihak ketiga	14.781		19.674	<i>Third parties</i>
Deposito berjangka <i>Mudharabah</i>		21		<i>Mudharabah time deposits</i>
Pihak ketiga	4.300		19.089	<i>Third parties</i>
Total simpanan dari bank lain	23.235		38.819	<i>Total deposits from other banks</i>
TOTAL DANA SYIRKAH				TOTAL TEMPORARY
TEMPORER	27.106.095		24.862.275	SYIRKAH FUNDS

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (continued)
As of December 31, 2023
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

	31 Desember/ December 31, 2023	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 31, 2022	
LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS (lanjutan)				LIABILITIES, TEMPORARY SYIRKAH FUNDS AND EQUITY (continued)
EKUITAS				EQUITY
Modal saham - nominal Rp500 (Rupiah penuh) per saham masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022				Capital stock - Rp500 par value per share (full amount) as of December 31, 2023 and 2022, respectively
Modal dasar 20.478.432.000 saham (nilai penuh) (terdiri dari 1 lembar saham seri A Dwiwarna dan 20.478.431.999 lembar saham seri B) masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022				Authorized capital 20,478,432,000 shares (full amount) (consisting of 1 share of Series A Dwiwarna and 20,478,431,999 shares of series B) as of December 31, 2023 and 2022, respectively
Modal ditempatkan dan disetor penuh 14.034.444.413 saham (nilai penuh) (terdiri dari 1 lembar saham seri A Dwiwarna dan 14.034.444.412 lembar Saham seri B) pada 31 Desember 2023 dan 10.590.000.000 saham (nilai penuh) (terdiri dari 1 lembar saham seri A Dwiwarna dan 10.589.999.999 lembar Saham seri B) pada tanggal 31 Desember 2022				Issued and fully paid capital 14,034,444,413 shares (full amount) (consisting of 1 share of series A Dwiwarna and 14,034,444,412 shares of series B) as of December 31, 2023 and 10.590.000.000 shares (full amount) (consisting of 1 share of series A Dwiwarna and 10.589.999.999 shares of series B) As of December 31, 2022
Tambahan modal disetor	7.017.222	2y,29a	5.295.000	Additonal paid-in capital
Dana setoran modal	4.418.900	29b	2.054.454	Capital deposit fund
Kerugian neto yang belum direalisasi dan cadangan kerugian penurunan nilai atas efek-efek dan obligasi pemerintah diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain- setelah pajak tangguhan	-	29d	2.756.575	Net unrealized loss allowance for and impairment losses on securities and government at fair value through other comprehensive income net of deferred tax
Pengukuran kembali program imbalan pasti - setelah pajak tangguhan	(769.001)	2i	(1.193.252)	Remeasurement of defined benefit plan - net of deferred tax
Bagian efektif lindung nilai arus kas	(560.339)	2ae	(409.657)	Effective portion of cash flow hedge
Surplus revaluasi aset tetap	(32.346)	2an,12	(49.301)	Revaluation surplus of premises and equipment
Saldo laba ^{*)}	3.565.773	2n,14	3.508.565	Retained earnings ^{*)}
Telah ditentukan penggunaannya	13.181.214		10.745.157	Appropriated
Belum ditentukan penggunaannya	3.657.729	2b,2y	3.201.813	Unappropriated
TOTAL EKUITAS	30.479.152		25.909.354	TOTAL EQUITY
TOTAL LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS	438.749.736		402.148.312	TOTAL LIABILITIES, TEMPORARY SYIRKAH FUNDS AND EQUITY

*) Saldo defisit sebesar Rp14.226.290 telah dieliminasi akibat kuasi-reorganisasi pada tanggal 31 Mei 2007.

*) Accumulated losses amounted to Rp14,226,290 was eliminated as a result of quasireorganization on May 31, 2007.

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
LAPORAN LABA RUGI DAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For the Year Ended
December 31, 2023
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,				
	2023	Catatan/ Notes	2022	
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL				INCOME AND EXPENSES FROM OPERATIONS
Pendapatan Bunga dan Bagi Hasil Bunga	24.722.529	2ab,2ac 30a	23.233.200	Interest Income and Income from Profit Sharing Interest
Bagi hasil dan margin unit syariah	3.558.723	2ad,30b	2.674.168	Profit sharing and margin from sharia unit
Total Pendapatan Bunga dan Bagi Hasil	28.281.252		25.907.368	Total Interest Income and Income from Profit Sharing
Beban Bunga, Bagi Hasil dan Bonus Bunga	(13.203.108)	2ab,31a	(9.866.919)	Interest, Profit Sharing and Bonus Expenses Interest
Beban pendanaan lainnya	(203.317)		(169.804)	Other financing expenses
Bonus simpanan <i>Wadiah</i>	(71.621)	2ad,31b	(57.558)	Wadiah Bonus
Hak pihak ketiga atas bagi hasil <i>Mudharabah</i>	(1.372.916)	2ad,31b	(815.803)	Third parties' share on return of Mudharabah
Total Beban Bunga, Bagi Hasil dan Bonus	(14.850.962)		(10.910.084)	Total Interest, Profit Sharing and Bonus Expenses
Pendapatan Bunga dan Bagi Hasil - Neto	13.430.290		14.997.284	Interest Income and Income from Profit Sharing - Net
Pendapatan Operasional Lainnya				Other Operating Income
Pungutan administrasi dan denda atas simpanan dan kredit yang diberikan	1.096.346		965.441	Administration fees and penalties on deposits and loans
Pendapatan dari penerimaan kredit yang dihapusbukukan	934.191		431.591	Income from recovery of loans written-off
Keuntungan dari penjualan efek-efek - neto	6.669	2i,8	-	Gain on sale of securities - net
Keuntungan dari penjualan obligasi pemerintah - neto	541.392	2i,9	-	Gain on sale of government bonds - net
Keuntungan yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar efek-efek - neto	1.802	2i,8	-	Unrealized gain on changes in fair value of securities - net
Keuntungan yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar obligasi pemerintah - neto	-	2i,9	55.045	Unrealized gain on changes in fair value of bonds - net
Lain-lain	1.310.747	32	822.775	Others
Total Pendapatan Operasional Lainnya	3.891.147		2.274.852	Total Other Operating Income
Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan dan Aset Non Keuangan	(3.765.397)	2e,2p,33	(4.017.378)	Provision for Impairment Losses on Financial and Non-financial Assets
(Penyisihan) pembalikan Estimasi Kerugian Penurunan Nilai Komitmen dan Kontinjensi	1.139	27	(1.075)	(Provision for) reversal of Estimated losses on Commitment and Contingencies

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
LAPORAN LABA RUGI DAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME (continued)
For the Year Ended
December 31, 2023
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,			
	2023	Catatan/ Notes	2022	
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL (lanjutan)				INCOME AND EXPENSES FROM OPERATIONS (continued)
Beban Operasional Lainnya				Other Operating Expenses
Umum dan administrasi	(3.884.779)	34	(3.754.028)	General and administrative
Gaji karyawan	(3.982.503)	2ae,2d,35,43	(4.190.298)	Salaries and employee benefits
Premi program penjaminan pemerintah	(656.774)	42	(599.991)	Premium on government's guarantee program
Kerugian yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar obligasi pemerintah - neto	(5.780)	2i,9	-	Unrealized losses on changes in fair value of government bonds - net
Kerugian dari penjualan obligasi pemerintah - neto	-	2i,9	(266.235)	Loss on sale of government bonds - net
Kerugian dari penjualan Efek-efek - neto	-	2i,8	(234.089)	Loss on sale of government securities - net
Kerugian yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar efek-efek - neto	-	2i,8	(64.931)	Unrealized losses on changes in fair value of securities - net
Lain-lain	(487.614)	36	(329.308)	Others
Total Beban Operasional Lainnya	(9.017.450)		(9.438.880)	Total Other Operating Expenses
LABA OPERASIONAL	4.539.729		3.814.803	INCOME FROM OPERATIONS
PENDAPATAN (BEBAN) BUKAN OPERASIONAL - NETO	(159.519)	37	60.887	NON-OPERATING INCOME (EXPENSES) - NET
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK	4.380.210		3.875.690	INCOME BEFORE TAX EXPENSE
BEBAN PAJAK	(879.222)	2ag,38	(830.617)	TAX EXPENSE
LABA TAHUN BERJALAN	3.500.988		3.045.073	INCOME FOR THE YEAR
Penghasilan Komprehensif Lain:				Other Comprehensive Income:
Akun-akun yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi				Items that will not be reclassified to profit or loss
Surplus revaluasi aset tetap	57.208	2n,14	200.574	Surplus revaluation of fixed asset
Pengukuran kembali program imbalan pasti	(186.027)	2ae,40	59.872	Remeasurement of defined benefit plan
Pajak penghasilan terkait akun-akun yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	35.345	38c	(11.376)	Income tax related to items that will not be reclassified to profit or loss
Akun-akun yang akan direklasifikasi ke laba rugi				Items that will be reclassified to profit or loss
Bagian efektif lindung nilai - arus kas	20.932		(40.883)	Effective part of hedging-cash flow
Keuntungan (kerugian) neto yang belum direalisasi atas perubahan nilai efek-efek dan obligasi pemerintah yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	517.528	2i,8,9	(1.576.967)	Net unrealized gain (loss) on changes in value of fair value through other comprehensive income securities and government bonds

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
LAPORAN LABA RUGI DAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN (lanjutan)
 Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal
 31 Desember 2023
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah,
 kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME (continued)
 For the Year Ended
 December 31, 2023
 (Expressed in millions of Rupiah,
 unless otherwise stated)

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,			
	2023	Catatan/ Notes	2022	
Penghasilan Komprehensif Lain: (lanjutan)				Other Comprehensive Income: (continued)
Akun-akun yang akan direklasifikasi ke laba rugi (lanjutan)				Items that will be reclassified to profit or loss (continued)
Pajak penghasilan terkait akun-akun yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(97.254)		307.463	Income tax related to items that will be reclassified to profit or loss
Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan	3.848.720		1.983.756	Total Comprehensive Income for the Year
LABA PER SAHAM				EARNINGS PER SHARE
Dasar (nilai penuh)	249	2ai,48	288	Basic (full amount)

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY (continued)
For the Year Ended December 31, 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Catatan/ Notes	Modal Ditempat kan dan Disetor Penuh/ Issued and Fully Paid Capital Stock	Tambah Modal disetor/ Additional Paid-in Capital	Dana Setoran Modal/ Deposit capital fund	Keuntungan (Kerugian) yang Belum Direalisasi dan Cadangan kerugian penurunan nilai atas Efek efek dan Obligasi Pemerintah yang Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain-Neto/ Unrealized Gain (Loss) and allowance for impairment losses on FVTOCI Securities and Government Bonds - Net	Pengukuran Kembali Program Imbalan Pasti - Neto/ Remeasureme nt of Defined Benefit Plan - Net	Surplus Revaluasi Aset Tetap/ Revaluation Surplus of Premises and Equipment	Bagian Efektif Lindung Nilai Arus Kas/ Effective Portion of Cash Flow Hedges	Saldo Laba/ Retained Earnings*)		Ekuitas/ Equity	
								Telah Ditentukan Penggunaan nya/ Appropriated	Belum Ditentukan Penggunaannya/ Unappropriated		
Saldo per 31 Desember 2021	5.295.000	2.054.454	-	87.817	(458.153)	3.307.991	(19.983)	8.606.555	2.532.966	21.406.647	Balance as of December 31, 2021
Total Laba (Rugi) komprehensif tahun berjalan	2h,8 9,12,40	-	-	(1.281.069)	48.496	200.574	(29.318)	-	3.045.073	1.983.756	Total comprehensive income (loss) for the year
Dana setoran modal	29d	-	-	2.756.575	-	-	-	-	-	2.756.575	Capital deposit fund
Dividen	29c	-	-	-	-	-	-	-	(237.624)	(237.624)	Dividend
Pembentukan cadangan umum dan cadangan tujuan	29c	-	-	-	-	-	-	2.138.602	(2.138.602)	-	Appropriation for general and special reserves
Saldo per 31 Desember 2022	5.295.000	2.054.454	2.756.575	(1.193.252)	(409.657)	3.508.565	(49.301)	10.745.157	3.201.813	25.909.354	Balance as of December 31, 2022

*) Saldo defisit sebesar Rp14.226.290 telah dieliminasi akibat kuasi-reorganisasi pada tanggal 31 Mei 2007.

*) Accumulated losses amounted to Rp14,226,290 had been eliminated as a result of quasi-reorganization as of May 31, 2007.

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY (continued)
For the Year Ended December 31, 2023
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	Modal Ditempat kan dan Disetor Penuh/ Issued and Fully Paid Capital Stock	Tambahan Modal disetor/ Additional Paid-in Capital	Dana Setoran Modal/ Deposit capital fund	Keuntungan (Kerugian) yang Belum Direalisasi dan Cadangan kerugian penurunan nilai atas Efek efek dan Obligasi Pemerintah yang Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain-Neto/ Unrealized Gain (Loss) and allowance for impairment losses on FVTOCI Securities and Government Bonds - Net	Pengukuran Kembali Program Imbalan Pasti - Neto/ Remeasureme nt of Defined Benefit Plan - Net	Surplus Revaluasi Aset Tetap/ Revaluation Surplus of Premises and Equipment	Bagian Efektif Lindung Nilai Arus Kas/ Effective Portion of Cash Flow Hedges	Saldo Laba/ Retained Earnings*)		Ekuitas/ Equity	
									Telah Ditentukan Penggunaan nya/ Appropriated	Belum Ditentukan Penggunaannya/ Unappropriated		
Saldo per 31 Desember 2022		5.295.000	2.054.454	2.756.575	(1.193.252)	(409.657)	3.508.565	(49.301)	10.745.157	3.201.813	25.909.354	Balance as of December 31, 2022
Total Laba (Rugi) komprehensif tahun berjalan	2h,8 9,12,40	-	-	-	424.251	(150.682)	57.208	16.955	-	3.500.988	3.848.720	Total comprehensive income (loss) for the year
Penerbitan saham		1.722.222	2.364.446	-	-	-	-	-	-	-	4.086.668	Shares issuance
Dana setoran modal	29d	-	-	(2.756.575)	-	-	-	-	-	-	(2.756.575)	Capital deposit fund
Dividen	29c	-	-	-	-	-	-	-	-	(609.015)	(609.015)	Dividend
Pembentukan cadangan umum dan cadangan tujuan	29c	-	-	-	-	-	-	-	2.436.057	(2.436.057)	-	Appropriation for general and special reserves
Saldo per 31 Desember 2023		7.017.222	4.418.900	-	(769.001)	(560.339)	3.565.773	(32.346)	13.181.214	3.657.729	30.479.152	Balance as of December 31, 2023

*) Saldo defisit sebesar Rp14.226.290 telah dieliminasi akibat kuasi-reorganisasi pada tanggal 31 Mei 2007.

*) Accumulated losses amounted to Rp14,226,290 had been eliminated as a result of quasi-reorganization as of May 31, 2007.

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
STATEMENT OF CASH FLOWS
For the Year Ended
December 31, 2023
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,			
	2023	Catatan/ Notes	2022	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan bunga, bagi hasil, dan marjin	27.618.186		24.331.326	Interest, profit sharing, and margin
Penerimaan kredit yang telah dihapusbukukan	1.011.258		503.307	Recoveries from loan debts written-off
Pembayaran bunga dan bonus, provisi dan komisi	(14.892.249)		(10.775.222)	Interest and bonus, fees and commissions paid
Pembayaran pajak penghasilan badan	(1.020.952)		(1.001.324)	Corporate income tax paid
Penerimaan dari surat ketetapan pajak	-	38	402.428	Recoveries from tax assessment letter
Beban operasional lainnya - neto	(5.790.828)		(6.896.183)	Other operating expenses - net
(Beban) pendapatan bukan operasional lainnya - neto	(54.382)		13.828	Other non-operating (expenses) income - net
Penerimaan kas sebelum perubahan aset dan liabilitas operasi	6.871.033		6.578.160	Cash receipts before changes in operating assets and liabilities
Perubahan dalam aset dan liabilitas operasi:				Changes in operating assets and liabilities:
Penurunan (kenaikan) dalam aset operasi:				Decrease (increase) in operating assets:
Efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	(246.380)		(104.885)	Fair value through profit or loss securities
Obligasi pemerintah yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	15.788.979		(4.955.939)	Fair value through profit or loss government bonds
Tagihan akseptasi	(124.005)		33.578	Acceptance receivable
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/ piutang syariah	(38.484.306)		(26.318.471)	Loans and sharia financing/ receivables
Aset lain-lain	(785.307)		(196.503)	Other assets
Kenaikan (penurunan) dalam liabilitas operasi:				Increase (decrease) in operating liabilities:
Liabilitas segera	74.415		(466.852)	Liabilities due immediately
Simpanan dari nasabah				Deposits from customer
Giro	24.468.372		31.538.044	Demand deposits
Giro Wadiah	4.814.656		3.268.857	Wadiah demand deposits
Tabungan	1.539.832		(10.617.072)	Savings deposits
Tabungan Wadiah	82.875		43.479	Savings deposits Wadiah
Deposito berjangka	(5.504.388)		(322.562)	Time deposits
Simpanan dari bank lain	(45.095)		70.400	Deposits from other banks
Liabilitas akseptasi	124.005		(33.578)	Acceptance payables
Liabilitas lain-lain	(4.184.154)		654.214	Other liabilities
Dana syirkah temporer	2.243.821		2.094.203	Temporary syirkah funds
Kas Neto				Net Cash
Diperoleh dari Aktivitas Operasi	6.634.353		1.265.073	provided by Operating Activities

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
LAPORAN ARUS KAS (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
STATEMENT OF CASH FLOWS (continued)
For the Year Ended
December 31, 2023
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,			
	2023	Catatan/ Notes	2022	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
(Pembelian) penerimaan saat jatuh tempo dari efek-efek biaya perolehan diamortisasi	(2.868.515)		199.964	(Purchase) receipt from matured amortized cost securities
Perolehan aset tetap (Pembelian) penerimaan efek-efek diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	(2.313.490)	14	(1.042.464)	Acquisitions of premises and equipment (Purchase) receipt in fair value through other comprehensive income securities
Penerimaan obligasi pemerintah diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	(1.247.159)		381.580	Receipt in fair value through other comprehensive income government bonds
Penerimaan (pembelian) obligasi pemerintah pada biaya perolehan diamortisasi	2.211.325		5.714.402	Receipt (purchase) of amortized cost government bonds
Penempatan efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	(1.655.566)		(7.816.426)	Placement of securities purchased under agreement to resell
Penerimaan efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	(43.597.267)		(165.520.488)	Receipt of securities purchased under agreement to resell
	45.031.457		165.683.898	
Kas Neto digunakan untuk Aktivitas Investasi	(4.439.215)		(2.399.534)	Net Cash used in Investing Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan atas surat berharga yang diterbitkan	2.449.019		1.541.330	Proceeds of securities issued
Pembayaran atas surat-surat berharga yang diterbitkan jatuh tempo	(2.769.764)		(5.263.000)	Payment of matured securities issued
Penerimaan atas efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	67.691.353		592.326	Proceeds from securities sold under repurchase agreements
Pembayaran atas jatuh tempo efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	(67.691.353)		(592.326)	Payments of matured securities sold under repurchase agreements
Pembayaran dividen	(609.015)	29c	(237.624)	Payments of dividends
Penerimaan dari pinjaman yang diterima	11.185.162		11.814.826	Proceeds from fund borrowings
Pembayaran dari pinjaman yang diterima	(2.187.576)		(9.095.884)	Payment of fund borrowings
Pembayaran liabilitas sewa	(81.973)	28	(84.983)	Payment of lease liabilities
Dana setoran modal	1.330.093		2.756.575	Shares issuance
Kas neto diperoleh dari aktivitas Pendanaan	9.315.946		1.431.240	Net Cash Provided by Financing Activities
KENAIKAN NETO KAS DAN SETARA KAS	11.511.084		296.779	NET INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	41.526.686		41.229.907	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF YEAR
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	53.037.770		41.526.686	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
LAPORAN ARUS KAS (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2023
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
STATEMENT OF CASH FLOWS (continued)
For the Year Ended
December 31, 2023
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Year Ended December 31,			
	2023	Catatan/ Notes	2022	
Rincian kas dan setara kas akhir tahun adalah sebagai berikut:				The details of cash and cash equivalents at end of year are as follows:
Kas	2.127.489	2a,4	1.661.533	Cash
Giro pada Bank Indonesia	18.145.761	2g,5	25.416.941	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	2.203.398	2g,6	1.472.257	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain - jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehan	30.561.122	2h,7	12.975.955	Placements with Bank Indonesia and other banks - maturing within three months or less since the acquisition date
Total	53.037.770		41.526.686	Total

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023 and
for the Year Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. UMUM

a. Pendirian Bank

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ("Bank") didirikan sebagai bank milik negara, semula dengan nama "Bank Tabungan Pos" berdasarkan Undang-undang Darurat No. 9 Tahun 1950 tanggal 9 Februari 1950. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 4 tahun 1963, nama Bank Tabungan Pos diubah menjadi "Bank Tabungan Negara". Pada tanggal 29 April 1989, Bank mulai beroperasi sebagai bank umum milik negara.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1992, status Bank diubah menjadi perseroan terbatas milik negara (Persero). Akta pendirian Bank sebagai Persero dibuat dihadapan Notaris Muhani Salim, S.H., No. 136 tanggal 31 Juli 1992 dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dengan Surat Keputusan No. C2-6587.HT.01.01. TH.92 tanggal 12 Agustus 1992, serta diumumkan dalam Berita Negara No. 73 tanggal 11 September 1992 Tambahan No. 6A.

Berdasarkan surat keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/55/KEP/DIR tanggal 23 September 1994, Bank memperoleh status sebagai bank devisa.

Bank telah mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia untuk melakukan kegiatan umum perbankan berdasarkan prinsip syariah melalui surat No. 6/1350/DPbS tanggal 15 Desember 2004.

Bank mulai melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah pada tanggal 14 Februari 2005 dengan mulai beroperasinya cabang syariah pertama di Jakarta - Harmoni.

Pernyataan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang menyetujui perubahan seluruh Anggaran Dasar PT Bank Tabungan Negara (Persero) menjadi Perseroan Terbuka telah diaktakan dengan akta notaris No. 7 tanggal 12 Oktober 2009 dari notaris Fathiah Helmi, S.H., Perubahan anggaran dasar tersebut mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat No. AHU-49309.AH.01.02. Tahun 2009.

1. GENERAL

a. Bank's establishment

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ("the Bank") was originally established as a state-owned bank under the name "Bank Tabungan Pos" based on Martial Law No. 9 of 1950 dated February 9, 1950. Subsequently, the name of the Bank was changed to "Bank Tabungan Negara" based on Government Regulation Amendment of Law No. 4 of 1963. The Bank started operating as a state-owned commercial bank on April 29, 1989.

Based on Government Regulation No. 24 of 1992, the status of the Bank was changed to a state-owned limited liability corporation (Persero). The Bank's deed of establishment as a limited liability corporation was documented under deed No. 136 dated July 31, 1992 of Notary Muhani Salim, S.H., and was approved by the Ministry of Justice in its Decision Letter No. C2-6587.HT.01.01. TH.92 dated August 12, 1992 and was published in Supplement No. 6A of State Gazette No. 73 dated September 11, 1992.

Based on the Decision Letter No. 27/55/KEP/DIR dated September 23, 1994 of the Directors of Bank Indonesia, the Bank obtained the status of a foreign exchange bank.

The Bank has obtained approval from Bank Indonesia to conduct commercial banking activities based on sharia principles through letter No. 6/1350/DPbS dated December 15, 2004.

The Bank started its activities based on sharia principles on February 14, 2005 with the operation of its first sharia branch in Jakarta - Harmoni.

The decision of the Extraordinary General Stockholders' Meeting to amend all of the Bank's Articles of Association to become a public company was notarized under notarial deed No. 7 dated October 12, 2009 of Fathiah Helmi, S.H., The amendment was approved by the Ministry of Laws and Human Rights in its letter No. AHU-49309.AH-01.02. of 2009.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian Bank (lanjutan)

Anggaran Dasar Bank telah mengalami beberapa kali perubahan. Penyesuaian terakhir dinyatakan dalam Akta No. 08 tanggal 8 April 2021 yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H., MKn., notaris di Jakarta, berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 10 Maret 2021 dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Keputusan No.AHU-AH.01.03-0288922 tanggal 4 Mei 2021.

Anggaran Dasar Bank telah mengalami beberapa kali perubahan. Penyesuaian terakhir dinyatakan dalam Akta No. 28 tanggal 28 Maret 2023 yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H., MKn., notaris di Jakarta, berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 16 Maret 2023 dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Keputusan No.AHU-0023685.AH.01.02 tanggal 20 April 2023.

Berdasarkan pasal 3 Anggaran Dasar Bank, ruang lingkup kegiatan Bank adalah menjalankan kegiatan umum perbankan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku, termasuk melakukan kegiatan Bank berdasarkan prinsip syariah.

Bank berdomisili di Jakarta dan kantor pusat Bank berlokasi di Jalan Gajah Mada No. 1, Jakarta Pusat.

Pada tanggal 31 Desember 2023, Bank memiliki 115 kantor cabang (termasuk 34 kantor cabang syariah), 616 kantor cabang pembantu (termasuk 75 kantor cabang pembantu syariah) (tidak diaudit).

Pada tanggal 31 Desember 2022, Bank memiliki 110 kantor cabang (termasuk 30 kantor cabang syariah), 606 kantor cabang pembantu (termasuk 69 kantor cabang pembantu syariah), dan 5 kantor kas syariah (tidak diaudit).

1. GENERAL (continued)

a. Bank's establishment (continued)

The Articles of Association of the Bank has been amended several times. The amendment was covered by Notarial Deed No. 08 dated April 8, 2021 of Ashoya Ratam, S.H., MKn., a notary in Jakarta, as approved in the Annual General Shareholders' Meeting on March 10, 2021 and approved by the Ministry of Laws and Human Rights of the Republic of Indonesia, in its Decision Letter No. AHU-AH.01.03-0288922 dated May 4, 2021.

The Articles of Association of the Bank has been amended several times. The amendment was covered by Notarial Deed No. 28 dated March 28, 2023 of Ashoya Ratam, S.H., MKn., a notary in Jakarta, as approved in the Annual General Shareholders' Meeting on March 16, 2023 and approved by the Ministry of Laws and Human Rights of the Republic of Indonesia, in its Decision Letter No. AHU-0023685.AH.01.02 dated April 20, 2023.

According to Article 3 of the Bank's Articles of Association, the scope of the Bank's activities is to conduct commercial banking activities in accordance with the prevailing laws and regulations, including the Bank's activities based on sharia principles.

The Bank is domiciled in Jakarta and its head office is located at Jalan Gajah Mada No. 1, Central Jakarta.

As of December 31, 2023, the Bank has 115 branch offices (including 34 sharia branch offices), 616 sub-branch offices (including 75 sharia sub-branch offices)(unaudited).

As of December 31, 2022, the Bank has 110 branch offices (including 30 sharia branch offices), 606 sub-branch offices (including 69 sharia sub-branch offices), and 5 sharia cash offices (unaudited).

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

b. Rekapitalisasi

Pada tanggal 28 Mei 1999, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 1999 tentang penambahan penyertaan Pemerintah pada Bank dalam rangka Program Rekapitalikassasi yang dijalankan oleh Pemerintah dengan nilai setinggi-tingginya sebesar Rp11.200.000. Pada tanggal 21 Agustus 2000, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2000 tentang penambahan modal Pemerintah pada Bank dalam rangka Program Rekapitalisasi yang dijalankan oleh Pemerintah dengan nilai setinggi-tingginya sebesar Rp2.805.000, sehingga tambahan penyertaan Pemerintah keseluruhan menjadi sebesar Rp14.005.000. Penambahan modal tersebut dilakukan melalui penerbitan obligasi rekapitalisasi Pemerintah untuk Bank sebesar Rp9.803.500 dan Rp4.201.500 masing-masing pada tanggal 25 Juli 2000 dan 31 Oktober 2000.

Pada tanggal 28 Februari 2001, Direksi Bank dan Menteri Keuangan menandatangani Kontrak Manajemen yang berisikan antara lain bahwa jumlah kebutuhan rekapitalisasi akhir Bank adalah sebesar Rp13.843.540 dan kelebihan obligasi rekapitalisasi sebesar Rp161.460 harus dikembalikan kepada Pemerintah. Pada tanggal 5 November 2001, kelebihan obligasi rekapitalisasi tersebut dikembalikan kepada Pemerintah.

Sebagai tindak lanjut dari Kontrak Manajemen tersebut, Menteri Keuangan Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 40/PMK.06/2008 tanggal 29 Februari 2008 tentang penetapan nilai akhir kebutuhan rekapitalisasi Bank sebesar Rp13.843.540 dan pelaksanaan hak-hak pemerintah yang timbul sebagai akibat penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam modal PT Bank Tabungan Negara (Persero) dalam rangka program rekapitalisasi bank umum dengan mengkonversi menjadi 13.843.540 lembar saham yang diterbitkan oleh Bank dengan nominal Rp1.000.000 (Rupiah penuh) per lembar. Peraturan ini berdaya laku surut sejak tanggal 31 Mei 2007.

1. GENERAL (continued)

b. Recapitalization

On May 28, 1999, the Government issued Government Regulation No. 52 of 1999 regarding the increase in the Government's capital participation in the Bank within the framework of the Government's Recapitalization Program for a maximum amount of Rp11,200,000. On August 21, 2000, the Government issued Government Regulation No. 68 of 2000 regarding the increase in the Government's capital participation in the Bank within the framework of the Government's Recapitalization Program for a maximum amount of Rp2,805,000 so that the additional Government capital participation would become Rp14,005,000. The increase in the Government participation was settled through the issuance to the Bank of the government's recapitalization bonds amounting to Rp9,803,500 and Rp4,201,500 on July 25, 2000 and October 31, 2000, respectively.

On February 28, 2001, the Bank's Directors and the Ministry of Finance entered into a Management Contract which includes, among others, the total final recapitalization requirement of the Bank of Rp13,843,540 and the excess recapitalization bonds of Rp161,460 which should be returned to the Government. On November 5, 2001, the Bank returned such excess recapitalization bonds to the government.

As a result of the Management Contract, the Ministry of Finance issued Regulation No. 40/PMK.06/2008 dated February 29, 2008 regarding the determination of the final amount of the Government's required capital contribution to the Bank amounting to Rp13,843,540 and implementation of the Government's rights as a result of the additional contributed capital by the Republic of Indonesia to the capital of PT Bank Tabungan Negara (Persero), as a limited liability company, in relation to the commercial banks' recapitalization program through conversion of additional capital to 13,843,540 shares of stock, which were issued by the Bank with a par value of Rp1,000,000 (full Rupiah) per share. This regulation was applied retroactively since May 31, 2007.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

c. Penerbitan Surat Berharga Bank

Bank telah menerbitkan obligasi sebanyak 25 (dua puluh lima) kali penerbitan, 1 (satu) kali penerbitan instrumen obligasi subordinasi, 1 (satu) kali penerbitan *global bond*, 7 (tujuh) kali penerbitan surat hutang jangka panjang, 2 (dua) kali penerbitan sukuk mudharabah sejak tanggal 25 Juli 1989 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Nama Obligasi/ Name of Bonds	Jumlah Nominal/ Nominal Amount	Jangka Waktu/ Term	Jatuh Tempo/ Maturity Date	Tingkat Bunga/ Interest
Rupiah				
Obligasi BTN I/ BTN Bonds I	50.000	5 tahun/years	25 Juli/ July 25, 1994*)	18,75% tetap/ fixed
Obligasi BTN II/ BTN Bonds II	50.000	5 tahun/years	1 Juni/ June 1, 1995*)	16,25% tetap/ fixed
Obligasi BTN III/ BTN Bonds III	50.000	5 tahun/years	11 November/ November 11, 1996*)	20,00% tetap/ fixed
Obligasi BTN IV/ BTN Bonds IV	100.000	5 tahun/years	23 Januari/ January 23, 1996*)	17,00% tetap/ fixed
Obligasi BTN V/ BTN Bonds V	150.000	5 tahun/years	31 Juli/ July 31, 1998*)	15,25% tetap untuk tahun pertama dan kedua, mengambang untuk tahun berikutnya hingga jatuh tempo/ 15.25% fixed for first and second years, in for remaining years until maturity
Obligasi BTN VI/ BTN Bonds VI	350.000	5 tahun/years	21 Desember/ December 21, 2000*)	17,25% tetap untuk tahun pertama, mengambang untuk tahun berikutnya hingga jatuh tempo/ 17.25% fixed for first year, floating for remaining years until maturity
Obligasi BTN VII/ BTN Bonds VII	200.000	5 tahun/years	22 Juli/ July 22, 2001*)	17,125% tetap untuk tahun pertama, mengambang untuk tahun berikutnya hingga jatuh tempo/ 17.125% fixed for first year, floating for remaining years until maturity
Obligasi BTN VIII/ BTN Bonds VIII	400.000	5 tahun/years	18 Juli/ July 18, 2002*)	14,15% tetap/ fixed
Obligasi BTN IX/ BTN Bonds IX	750.000	5 tahun/years	2 Oktober/ October 2, 2008*)	12,50% tetap/ fixed
Obligasi BTN X/ BTN Bonds X	750.000	5 tahun/years	25 Mei/ May 25, 2009*)	12,20% tetap/ fixed
Obligasi BTN XI/ BTN Bonds XI	750.000	5 tahun/years	6 Juli/ July 6, 2010*)	12,00% tetap/ fixed
Obligasi BTN XII/ BTN Bonds XII	1.000.000	10 tahun/years	19 September/ September 19, 2016*)	12,75% tetap/ fixed
Obligasi BTN XIII A/ BTN Bonds XIII A	300.000	3 tahun/years	29 Mei/ May 29, 2012*)	11,75% tetap/ fixed
Obligasi BTN XIII B/ BTN Bonds XIII B	300.000	4 tahun/years	29 Mei/ May 29, 2013*)	12,00% tetap/ fixed
Obligasi BTN XIII C/ BTN Bonds XIII C	900.000	5 tahun/years	29 Mei/ May 29, 2014*)	12,25% tetap/ fixed
Obligasi BTN XIV/ BTN Bonds XIV	1.650.000	10 tahun/years	11 Juni/ June 11, 2020*)	10,25% tetap/ fixed
Obligasi BTN XVI/ BTN Bonds XV	1.300.000	10 tahun/years	28 Juni/ June 28, 2021*)	9,50% tetap/ fixed
Obligasi Berkelanjutan I Tahap I BTN/ Continuing Bonds I Phase I BTN	2.000.000	10 tahun/years	5 Juni/ June 5, 2022*)	7,90% tetap/ fixed

*) Bank telah melakukan pelunasan obligasi yang diterbitkan pada tanggal jatuh temponya.

1. GENERAL (continued)

c. Issuance of Bank Securities

The Bank issued 25 (twenty-five) series of bonds, 1 (one) series of subordinated bond, 1 (one) series of *global bond*, 7 (seven) series of long term notes, 2 (two) *sukuk mudharabah* from July 25, 1989 to December 31, 2023, with the details as follows:

*) The Bank has made the repayment of bonds issued on maturity date.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

c. Penerbitan Surat Berharga Bank (lanjutan)

Bank telah menerbitkan obligasi sebanyak 25 (dua puluh lima) kali penerbitan, 1 (satu) kali penerbitan instrumen obligasi subordinasi, 1 (satu) kali penerbitan *global bond*, 7 (tujuh) kali penerbitan surat hutang jangka panjang, 2 (dua) kali penerbitan sukuk mudharabah sejak tanggal 25 Juli 1989 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut: (lanjutan)

Nama Obligasi/ Name of Bonds	Jumlah Nominal/ Nominal Amount	Jangka Waktu/ Term	Jatuh Tempol/ Maturity Date	Tingkat Bunga/ Interest
Rupiah				
Obligasi Berkelanjutan I Tahap II BTN/ Continuing Bonds I Phase II BTN	2.000.000	10 tahun/years	27 Maret/ March 27, 2023*)	7,90% tetap/ fixed
Obligasi Berkelanjutan II Tahap I BTN/ Continuing Bonds II Phase I BTN				
Seri A/A Series	900.000	3 tahun/years	8 Juli/ July 8, 2018*)	9,63% tetap/ fixed
Seri B/B Series	500.000	5 tahun/years	8 Juli/ July 8, 2020*)	9,88% tetap/ fixed
Seri C/C Series	800.000	7 tahun/years	8 Juli/ July 8, 2022*)	10,00% tetap/ fixed
Seri D/D Series	800.000	10 tahun/years	8 Juli/ July 8, 2025	10,50% tetap/ fixed
Obligasi Berkelanjutan II Tahap II BTN/ Continuing Bonds II Phase II BTN				
Seri A/A Series	1.347.000	3 tahun/years	30 Agustus/ August 30, 2019*)	8,20% tetap/ fixed
Seri B/B Series	1.653.000	5 tahun/years	30 Agustus/ August 30, 2021*)	8,75% tetap/ fixed
Obligasi Berkelanjutan III Tahap I BTN/ Continuing Bonds III Phase I BTN				
Seri A/A Series	1.466.000	3 tahun/years	13 Juli/ July 13, 2020*)	8,30% tetap/ fixed
Seri B/B Series	1.295.000	5 tahun/years	13 Juli/ July 13, 2022*)	8,50% tetap/ fixed
Seri C/C Series	853.000	7 tahun/years	13 Juli/ July 13, 2024	8,70% tetap/ fixed
Seri D/D Series	1.386.000	10 tahun/years	13 Juli/ July 13, 2027	8,90% tetap/ fixed
Obligasi Berkelanjutan III Tahap II BTN/ Continuing Bonds III Phase II BTN				
Seri A/A Series	1.756.500	1 tahun/year	8 Juli/ July 8, 2020*)	7,75% tetap/ fixed
Seri B/B Series	1.168.000	3 tahun/years	28 Juni/ June 28, 2022*)	8,75% tetap/ fixed
Seri C/C Series	1.219.500	5 tahun/years	28 Juni/ June 28, 2024	9,00% tetap/ fixed
Obligasi Subordinasi BTN II/ Subordinated Bonds BTN I	250.000	10 tahun/years	25 Mei/ May 25, 2014**)	12,60% tetap untuk tahun pertama sampai tahun kelima, 22,60% tetap untuk tahun keenam sampai tahun kesepuluh jika Bank tidak melakukan opsi beli pada tahun kelima sejak tanggal penerbitan/ 12.60% fixed for first year until fifth year, 22.60% fixed for sixth year until tenth year if the Bank does not exercise its option to buyback on the fifth year since the issuance date

*) Bank telah melakukan pelunasan obligasi yang diterbitkan pada tanggal jatuh temponya.

**) Bank telah melakukan opsi beli kembali pada 25 Mei 2009

1. GENERAL (continued)

c. Issuance of Bank Securities (continued)

The Bank issued 25 (twenty-five) series of bonds, 1 (one) series of subordinated bond, 1 (one) series of global, 7 (seven) series of long term notes, 2 (two) sukuk mudharabah from July 25, 1989 to December 31, 2023, with the details as follows: (continued)

*) The Bank has made the repayment of bonds issued on maturity date.

**) The Bank has exercised the call options on May 25, 2009

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

c. Penerbitan Surat Berharga Bank (lanjutan)

Bank telah menerbitkan obligasi sebanyak 25 (dua puluh lima) kali penerbitan, 1 (satu) kali penerbitan instrumen obligasi subordinasi, 1 (satu) kali penerbitan *global bond*, 7 (tujuh) kali penerbitan surat hutang jangka panjang, 2 (dua) kali penerbitan sukuk mudharabah sejak tanggal 25 Juli 1989 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut: (lanjutan)

Nama Obligasi/ Name of Bonds	Jumlah Nominal/ Nominal Amount	Jangka Waktu/ Term	Jatuh Tempol/ Maturity Date	Tingkat Bunga/ Interest
Rupiah				
Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I BTN/ Continuing Bonds IV Phase I BTN				
Seri A/A Series	577.000	1 tahun/year	29 Agustus/ August 29, 2021*)	6,75% tetap/ fixed
Seri B/B Series	727.000	3 tahun/years	19 Agustus/ August 19, 2023*)	7,80% tetap/ fixed
Seri C/C Series	196.000	5 tahun/years	19 Agustus/ August 19, 2025	8,40% tetap/ fixed
Surat Hutang Jangka Panjang BTN Tahap I 2021/ Long Term Notes BTN Phase 1 2021	10.186	16 tahun/years	17 Juni/ June 17, 2037	1,37% tetap/ fixed
Surat Hutang Jangka Panjang BTN Seri A 2022/ Long Term Notes BTN Series A 2022	47.740	14 tahun/years	12 Oktober/ October 12, 2036	1,37% tetap/ fixed
Surat Hutang Jangka Panjang BTN Seri B 2022/ Long Term Notes BTN Series B 2022	79.379	15 tahun/years	12 April/ April 12, 2037	0,55% tetap/ fixed
Surat Hutang Jangka Panjang BTN Tahap I 2022/ Long Term Notes BTN Phase I 2022	210.866	15 tahun/years	14 Juni/ June 14, 2037	0,55% tetap/ fixed
Surat Hutang Jangka Panjang BTN Tahap II 2022/ Long Term Notes BTN Phase II 2022	131.185	14 tahun/years	28 Maret/ March 28, 2037	0,55% tetap/ fixed
Surat Hutang Jangka Panjang BTN Tahap I 2023/ Long Term Notes BTN Phase I 2023	35.898	14 tahun/years	28 April/ April 28, 2037	0,55% tetap/ fixed
Surat Hutang Jangka Panjang BTN Tahap II 2023/ Long Term Notes BTN Phase II 2023	404.745	14 tahun/years	15 September/ September 15, 2037	1,37% tetap/ fixed
Surat Hutang Jangka Panjang BTN Seri A 2023/ Long Term Notes BTN Series A 2023	6.242	15 tahun/years	27 Desember/ December 27, 2038	0,55% tetap/ fixed
Surat Hutang Jangka Panjang BTN Seri B 2023/ Long Term Notes BTN Series B 2023	234.542	14 tahun/years	27 Desember/ December 27, 2037	1,37% tetap/ fixed
Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II BTN/ Continuing Bonds IV Phase II BTN				
Seri A/A Series	600.000	3 tahun/year	24 Mei/ May 24, 2025	5,50% tetap/ fixed
Seri B/B Series	400.000	5 tahun/years	24 Mei/ May 24, 2027	6,00% tetap/ fixed

*) Bank telah melakukan pelunasan obligasi yang diterbitkan pada tanggal jatuh tempornya.

**) Bank telah melakukan opsi beli kembali pada 25 Mei 2009

1. GENERAL (continued)

c. Issuance of Bank Securities (continued)

The Bank issued 25 (twenty-five) series of bonds, 1 (one) series of subordinated bond, 1 (one) series of *global bond*, 7 (seven) series of long term notes, 2 (two) sukuk mudharabah from July 25, 1989 to December 31, 2023, with the details as follows: (continued)

*) The Bank has made the repayment of bonds issued on maturity date.

**) The Bank has exercised the call options on May 25, 2009

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

c. Penerbitan Surat Berharga Bank (lanjutan)

Bank telah menerbitkan obligasi sebanyak 25 (dua puluh lima) kali penerbitan, 1 (satu) kali penerbitan instrumen obligasi subordinasi, 1 (satu) kali penerbitan *global bond*, 7 (tujuh) kali penerbitan surat hutang jangka panjang, 2 (dua) kali penerbitan sukuk mudharabah sejak tanggal 25 Juli 1989 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut: (lanjutan)

Nama Obligasi/ Name of Bonds	Jumlah Nominal/ Nominal Amount	Jangka Waktu/ Term	Jatuh Tempo/ Maturity Date	Tingkat Bunga/ Interest
Rupiah				
Sukuk BTN I Tahun 2023 Tahap I/ Sukuk BTN Phase I 2023	92.553	15,5 tahun/years	28 Oktober/ October 28, 2036	11,00%***
Sukuk BTN I Tahun 2023 Tahap II/ Sukuk BTN Phase II 2023	175.039	13 tahun/years	27 Desember/ December 27, 2036	27,40%****
Dolar Amerika Serikat/United States Dollar				
BBTN September or Global Bond 2020/ BBTN September or Global Bond 2020	300.000.000	5 tahun/years	23 Januari/ January 23, 2025	4,20% tetap/ fixed
***) 11% dari pendapatan yang dibagi hasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar 0,55% per tahun.				
****) 27,40% dari pendapatan yang dibagi hasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar 1,37% per tahun.				

d. Penawaran Umum Saham Perdana (IPO)

Bank telah memperoleh izin untuk melakukan Penawaran Umum sesuai dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang tertuang dalam Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No.PW.01/3104/DPRI/V/2009 tanggal 29 Mei 2009, serta penetapan dari Pemerintah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 tahun 2009 dan diundangkan dalam Lembaran Negara No.167 tanggal 16 November 2009 tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan dan Penjualan Saham Baru Pada PT Bank Tabungan Negara (Persero).

Berdasarkan Surat Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) No. S-10523/BL/2009 tanggal 8 Desember 2009, pernyataan pendaftaran yang diajukan Bank dalam rangka IPO sejumlah 6.353.999.999 lembar Saham Biasa Atas Nama Seri B milik Negara Republik Indonesia dan 2.360.057.000 lembar Saham Biasa Atas Nama Seri B baru, dengan nilai nominal sebesar Rp500 (Rupiah penuh) setiap saham kepada masyarakat telah menjadi efektif pada tanggal 8 Desember 2009. Saham yang ditawarkan tersebut dicatatkan dan mulai diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 17 Desember 2009 dengan harga jual Rp800 (Rupiah penuh) per saham.

1. GENERAL (continued)

c. Issuance of Bank Securities (continued)

The Bank issued 25 (twenty-five) series of bonds, 1 (one) series of subordinated bond, 1 (one) series of *global bond*, 7 (seven) series of long term notes, 2 (two) sukuk mudharabah from July 25, 1989 to December 31, 2023, with the details as follows: (continued)

d. Initial Public Offering (IPO)

The Bank obtained a permit to undertake a Public Offering based on the approval of the House of Representatives of the Republic of Indonesia in its Chairman Letter No. PW.01/3104/DPRI/V/2009 dated May 29, 2009 and was enacted by the Government as stipulated by the Republic of Indonesia Government Regulation No. 66 of 2009 and circulated in State Gazette No. 167 dated November 16, 2009 regarding the amendment of the stock ownership structure of the State through Initial Public Offering of the shares of PT Bank Tabungan Negara (Persero).

Based on Letter No. S-10523/BL/2009 of the Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency (BAPEPAM-LK) dated December 8, 2009, the Registration Statement submitted by the Bank relating to the IPO of 6,353,999,999 ordinary shares Series B of the Republic of Indonesia and 2,360,057,000 new ordinary shares Series B, at par value of Rp500 (full Rupiah) per share to the public, became effective on December 8, 2009. The shares which were offered to the public, were listed and traded on the Indonesia Stock Exchange on December 17, 2009, with the selling price of Rp800 (full Rupiah) per share.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

d. Penawaran Umum Saham Perdana (IPO) (lanjutan)

Berkaitan dengan penawaran umum saham perdana, Bank telah mengimplementasikan program kepemilikan saham oleh Manajemen dan Karyawan (*Management and Employee Stock Allocation/MESA*). Program MESA diberikan maksimal 9,62% dari saham baru yang diterbitkan kepada karyawan yang tercatat pada tanggal 31 Desember 2009. Program MESA tersebut telah efektif pada tanggal 17 September 2009 dan seluruh karyawan yang memiliki kualifikasi telah mengambil program tersebut dengan jumlah lembar saham biasa atas nama Seri B sebanyak 226.928.500 lembar (nilai nominal Rp500 per lembar saham) dengan harga beli Rp640 per lembar saham (setelah diskon 20% dari harga penawaran perdana sebesar Rp800 per lembar saham) dengan masa *lock up* selama enam bulan.

Diskon harga saham untuk program MESA menjadi beban Bank di tahun 2009, yaitu sebesar 20% atau Rp41.353, yang termasuk beban pajak penghasilan.

e. Program Opsi Kepemilikan Saham untuk Manajemen dan Karyawan

Sesuai dengan RUPS Luar Biasa tanggal 12 Oktober 2009, pemegang saham menyetujui penerbitan saham opsi sebanyak 363.085.500 lembar saham yang akan dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap. Opsi saham diberikan kepada manajemen dan karyawan pada posisi dan jabatan tertentu yang memenuhi Persyaratan yang telah ditetapkan (*Management & Employee Stock Option Plan (MESOP)*).

Manajemen dan karyawan Bank telah melakukan eksekusi atas opsi saham yang dimulai tahun 2011 dengan rincian untuk MESOP I dengan akhir hak opsi pada tahun 2014 sebanyak 145.234.500, MESOP II dengan akhir hak opsi pada tahun 2015 sebanyak 108.925.500 lembar saham, dan MESOP III dengan akhir hak opsi pada tahun 2016 sebanyak 108.925.500 lembar saham. Agio yang timbul dari eksekusi tersebut untuk tahun 2011 adalah sebesar Rp94.733, tahun 2012 adalah sebesar Rp6.349, tahun 2013 adalah sebesar Rp232.261, tahun 2014 adalah sebesar Rp2.372, tahun 2015 adalah sebesar Rp18.462, tahun 2016 adalah sebesar Rp7.856.

1. GENERAL (continued)

d. Initial Public Offering (IPO) (continued)

In relation to the Initial Public Offering of the shares, the Bank implemented the Management and Employee Stock Allocation (MESA) program. MESA program is allocated with a maximum of 9.62% of the newly issued shares for registered employees as of December 31, 2009. The MESA Program became effective on September 17, 2009 and all qualified employees availed of the program consisting of 226,928,500 Series B shares (with par value of Rp500 per share) with a purchase price of Rp640 per share (after share price discount of 20% from the initial public offering price of Rp800 per share) and a lock up period until six months.

In relation to the Initial Public Offering of the share price discount for MESA program was recognized as the Bank's expense in 2009, amounting to 20% or Rp41,353 including the income tax expense.

e. Management & Employee Stock Option Plan (MESOP)

In accordance with the Extraordinary GMS on 12 October 2009, shareholders approved the issuance of 363,085,500 share options which will be implemented in 3 (three) stages. Stock options are granted to management and employees in certain positions and titles who meet the specified requirements (Management & Employee Stock Option Plan (MESOP)).

The Bank's management and employees have executed share options starting in 2011 with details for MESOP I with the end of the option rights in 2014 amounting to 145,234,500, MESOP II with the end of the option rights in 2015 amounting to 108,925,500 shares, and MESOP III with the end of the option rights in 2016 amounting to 108,925,500 shares. The agio from the execution in 2011 was Rp94,733, in 2012 it was Rp6,349, in 2013 it was Rp232,261, in 2014 it was Rp2,372, in 2015 it was Rp18,462, in 2016 it was amounting to Rp7,856.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

f. Penawaran Umum Saham Terbatas I

Untuk memperkuat struktur permodalan, melalui persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 7 November 2012 dan Surat Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) No. S-13001/BL/2012 tanggal 6 November 2012, Bank melakukan Penawaran Umum Terbatas I ("PUT I") dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sebanyak 1.512.857.500 saham Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp500 (nilai penuh) setiap saham. Setiap pemegang 555.000 saham lama berhak membeli 94.943 saham baru dengan harga Rp1.235,00 (nilai penuh) setiap saham. Dari PUT I ini, Bank meningkatkan modal sahamnya sebanyak 1.512.857.500 lembar saham Seri B yang diterbitkan kepada masyarakat umum pada tanggal 4 Desember 2012 dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

g. Penawaran Umum Saham Terbatas II

Untuk memperkuat struktur permodalan, melalui persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 18 Oktober 2022 dan surat OJK No. S-264/D.04/2022 tanggal 14 Desember 2022 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran, Bank melakukan Penawaran Umum Terbatas II ("PUT II") dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sebanyak 3.444.444.413 saham Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp500 (nilai penuh) setiap saham. Setiap pemegang 100.000.000 saham lama berhak membeli 32.525.443 saham baru dengan harga Rp1.200,00 (nilai penuh) setiap saham. Dari PUT II ini, Bank meningkatkan modal sahamnya sebanyak 3.444.444.413 lembar saham Seri B yang diterbitkan kepada masyarakat umum pada tanggal 10 Januari 2023 dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

h. Penerapan kuasi reorganisasi

Kondisi ekonomi yang buruk yang terjadi sejak pertengahan tahun 1997 sampai dengan tahun 1999, yang disebabkan terutama oleh melemahnya kurs mata uang rupiah terhadap mata uang asing, seperti dolar Amerika Serikat dan tingkat suku bunga yang tidak stabil, sangat langkanya likuiditas serta menurunnya tingkat kepercayaan investor, telah memberikan dampak yang buruk bagi industri perbankan di Indonesia. Kondisi tersebut juga berdampak pada para debitur Bank dalam memenuhi kewajibannya, sehingga Bank mengalami defisit yang cukup besar.

1. GENERAL (continued)

f. Limited Public Offering I

To Strengthen the capital structure, through the approval of the Extraordinary General Meeting of Shareholders on November 7, 2012 and on Letter No. S-13001/BL/2012 of the Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency (BAPEPAM-LK) dated November 6, 2012, the Bank undertook a Limited Public Offering I ("LPO I") through the issuance of pre-emptive rights of 1,512,857,500 Class B shares with a par value per share of Rp500 (full amount). Each holder of 555,000 share was entitled to buy 94,943 new shares for Rp1,235.00 (full amount) per share. As a result of LPO I, the Bank increased its capital by 1,512,857,500 Class B shares issued to the public on December 04, 2012 and the LPO I listed in the Indonesia Stock Exchanges.

g. Limited Public Offering II

To Strengthen the capital structure, through the approval of the Extraordinary General Meeting of Shareholders on October 18, 2022 and Letter from OJK No. S-264/D.04/2022 dated December 14, 2022 about Notification of Effectiveness of Registration Statement, the Bank undertook a Limited Public Offering II ("LPO II") through the issuance of pre-emptive rights of 3,444,444,413 Class B shares with a par value per share of Rp500 (full amount). Each holder of 100,000,000 share was entitled to buy 32,525,443 new shares for Rp1,200.00 (full amount) per share. As a result of LPO II, the Bank increased its capital by 3,444,444,413 Class B shares issued to the public on January 10, 2023 and the LPO II listed in the Indonesia Stock Exchanges.

h. Implementation of quasi - reorganization

The unfavorable economic condition starting in mid-1997 until 1999, which was caused mainly by the weakening of the rupiah in relation to other foreign currencies such as the United States dollar, the instability of interest rates, liquidity problem and the low level of trust by investors, had an adverse impact to the banking industry in Indonesia. This condition also affected the Bank debtors in fulfilling their obligations. As a result, the Bank suffered a significant amount of deficit.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

h. Penerapan kuasi reorganisasi (lanjutan)

Untuk memperoleh awal yang baik (fresh start) dengan laporan posisi keuangan yang menunjukkan nilai sekarang dan tidak dibebani oleh defisit, maka Bank melaksanakan Kuasi-Reorganisasi per 31 Mei 2007 (Catatan 2c). Kuasi-Reorganisasi dilakukan Bank sebagai langkah penting untuk bisa meneruskan usaha secara lebih baik.

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tanggal 19 Januari 2006, pemegang saham Bank memutuskan antara lain bahwa pemegang saham mendukung rencana Bank untuk melakukan Kuasi-Reorganisasi dalam rangka menetapkan besarnya nilai akhir Penyertaan Modal Negara dalam Bank dan perbaikan struktur modal Bank, dan agar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sebagai hasil dari Kuasi-Reorganisasi, saldo defisit Bank sebesar Rp14.226.290 dieliminasi ke akun saldo laba.

i. Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Komite Audit dan Karyawan

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Bank tanggal 16 Maret 2023, dengan berita acara No. 16 yang dibuat oleh Notaris Ashoya Ratam, SH., MKn, susunan Dewan Komisaris Bank adalah sebagai berikut:

31 Desember 2023

Komisaris Utama/Independen
Wakil Komisaris Utama/Independen
Komisaris Independen
Komisaris Independen
Komisaris Independen
Komisaris
Komisaris
Komisaris
Komisaris

Chandra M. Hamzah
Iqbal Latanro
Armand Bachtiar Arief
Aldi Jumhari Luddin**
Sentot A. Sentaosa
Andin Hadiyanto
Herry Trisaputra Zuna
Himawan Arief Sugoto
Mohamad Yusuf Permana*

* Diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk berdasarkan hasil keputusan RUPS Luar Biasa Perseroan tanggal 11 Januari 2023 dan telah efektif pada tanggal 07 Juni 2023 berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris OJK No. KEPR-46/D.03/2023 tanggal 07 Juni 2023.

** Berakhir masa jabatan tanggal 12 Agustus 2023 karena meninggal dunia.

1. GENERAL (continued)

h. Implementation of quasi – reorganization (continued)

In order to make a fresh start with a statement of financial position showing present values without the burden of deficit, the Bank conducted a Quasi-Reorganization on May 31, 2007 (Note 2c). The Quasi-Reorganization was recognized by the Bank as a necessary step to positively continue its business.

In the Bank's General Stockholders' Meeting held on January 19, 2006 regarding the Approval of the Bank's Budget and Work Plan, the stockholders approved, among others, the Bank's plan to conduct the Quasi-Reorganization in order to determine the final amount of the Government's capital contribution and to restructure the Bank's capital, which should be implemented according to the prevailing regulations.

As a result of the quasi-reorganization, the Bank's deficit balance amounting to Rp14,226,290 was eliminated against the net amount of the retained earnings.

i. Boards of Commissioners, Directors, Sharia Supervisory Board, Audit Committee and Employees

Based on the Bank's The Annual General Meeting of Shareholders held on March 16, 2023, as stated under the notarial No. 16 by Notary Ashoya Ratam, SH., MKn, the composition of the Bank's Board of Commissioners are as follows:

December 31, 2023

President/Independent Commissioner
Vice President/Independent Commissioner
Independent Commissioner
Independent Commissioner
Independent Commissioner
Commissioner
Commissioner
Commissioner
Commissioner

* Appointed as a member of Board of Commissioners of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk based on the Annual General Meeting of Shareholders dated January 11, 2023 and has been effective on June 7, 2023 based on Financial Service Authority's Decision No. KEPR-46/D.03/2023 dated June 7, 2023.

** Ends of term of positions on August 12, 2023 due to passed away.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

i. Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Komite Audit dan Karyawan (lanjutan)

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Bank tanggal 2 Maret 2022, dengan berita acara No. 04 yang dibuat oleh Notaris Ashoya Ratam, SH., MKn, susunan Dewan Komisaris Bank adalah sebagai berikut:

31 Desember 2022

Komisaris Utama/Independen
Wakil Komisaris Utama/Independen
Komisaris
Komisaris
Komisaris
Komisaris
Komisaris Independen
Komisaris Independen
Komisaris Independen

Chandra M. Hamzah
Iqbal Latanro
Heru Budi Hartono****
Andin Hadiyanto
Herry Trisaputra Zuna***
Himawan Arief Sugoto**
Armand Bachtiar Arief
Ahdi Jumhari Luddin
Sentot A. Sentausa*

* Diangkat sebagai Anggota Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk berdasarkan hasil keputusan RUPS Tahunan Perseroan tanggal 2 Maret 2022 dan telah efektif pada tanggal 8 Agustus 2022 berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. 31/KDK.03/2022 tanggal 8 Agustus 2022.

** Diangkat sebagai Anggota Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk berdasarkan hasil keputusan RUPS Tahunan Perseroan tanggal 2 Maret 2022 dan telah efektif pada tanggal 3 Oktober 2022 berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-149/D.03/2022 tanggal 3 Oktober 2022.

*** Diangkat sebagai Anggota Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk berdasarkan hasil keputusan RUPS Tahunan Perseroan tanggal 2 Maret 2022 dan telah efektif pada tanggal 11 Oktober 2022 berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-162/D.03/2022 tanggal 11 Oktober 2022.

****Berdasarkan Surat Perseroan No. 582/DIR/CSD/X/2022 perihal Laporan Informasi atau Fakta Material tertanggal 14 Oktober 2022, masa jabatan Heru Budi Hartono selaku anggota Dewan Komisaris Perseroan berakhir sejak pelantikan dirinya menjadi Penjabat Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2022. Sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan Heru Budi Hartono tersebut, Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan.

1. GENERAL (continued)

i. Boards of Commissioners, Directors, Sharia Supervisory Board, Audit Committee and Employees (continued)

Based on the Bank's The Annual General Meeting of Shareholders held on March 2, 2022, as stated under the notarial No. 04 by Notary Ashoya Ratam, SH., MKn, the composition of the Bank's Board of Commissioners are as follows:

December 31, 2022

President/Independent Commissioner
Vice President/Independent Commissioner
Commissioner
Commissioner
Commissioner
Commissioner
Independent Commissioner
Independent Commissioner
Independent Commissioner

* Appointed as the Board of Commissioner of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, based on the Annual General Meeting of Shareholder dated March 2, 2022 and has been effective on August 8, 2022 based on Financial Service Authority's Decision No. 31/KDK.03/2022 dated August 8, 2022.

** Appointed as the Board of Commissioner of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, based on the Annual General Meeting of Shareholder dated March 2, 2022 and has been effective on October 3, 2022 based on Financial Service Authority's Decision No. KEP-149/D.03/2022 dated October 3, 2022.

*** Appointed as the Board of Commissioner of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, based on the Annual General Meeting of Shareholder dated March 2, 2022 and has been effective on October 11, 2022 based on Financial Service Authority's Decision No. KEP-162/D.03/2022 dated October 11, 2022.

**** Based on Company Letter No. 582/DIR/CSD/X/2022 regarding Report on Material Information or Facts dated October 14, 2022, Heru Budi Hartono's term of office as a member of the Company's Board of Commissioners ended since his inauguration as Acting Governor of the Special Capital Region of Jakarta on October 17, 2022. In connection with the expiration of Heru Budi Hartono, the Company will hold a General Meeting of Shareholders to comply with the provisions of the laws and regulations and the Company's articles of association.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

**i. Dewan Komisaris, Direksi, Dewan
Pengawas Syariah, Komite Audit dan
Karyawan (lanjutan)**

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Bank tanggal 16 Maret 2023, dengan berita acara No. 16 yang dibuat oleh Notaris Ashoya Ratam, SH., MKn, susunan Direksi Bank adalah sebagai berikut:

31 Desember 2023

Direktur Utama
Wakil Direktur Utama
Direktur IT and Digital
Direktur Assets Management
Direktur Distribution and Funding
Direktur Risk Management
Direktur Consumer
Direktur Finance
Direktur Human Capital,
Compliance and Legal
Direktur Institutional Banking

Nixon Lambok Pahotan Napitupulu*
Oni Febriarto Rahardjo**
Andi Nirwoto
Elisabeth Novie Riswanti
Jasmin
Setiyo Wibowo
Hirwandi Gafar
Nofry Rony Poetra

Eko Waluyo
Hakim Putratama***

* Menerima pengalihan tugas sebagai Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, berdasarkan hasil keputusan RUPS Tahunan Perseroan tanggal 16 Maret 2023 dan telah efektif pada tanggal 07 Juni 2023 berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEPR-44/D.03/2023 tanggal 07 Juni 2023.

** Diangkat sebagai Wakil Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk berdasarkan hasil keputusan RUPS Tahunan Perseroan tanggal 16 Maret 2023 dan telah efektif pada tanggal 07 Juni 2023 berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEPR-45/D.03/2023 tanggal 07 Juni 2023.

*** Diangkat sebagai anggota Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk berdasarkan hasil keputusan RUPS Tahunan Perseroan tanggal 16 Maret 2023 dan telah efektif pada tanggal 26 Juli 2023 berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEPR-83/D.03/2023 tanggal 26 Juli 2023.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Bank tanggal 2 Maret 2022, dengan berita acara No. 04 yang dibuat oleh Notaris Ashoya Ratam, SH., MKn, susunan Direksi Bank adalah sebagai berikut:

31 Desember 2022

Direktur Utama
Wakil Direktur Utama
Direktur Consumer
Direktur Finance
Direktur Human Capital,
Compliance and Legal
Direktur Assets Management
Direktur IT and Digital
Direktur Distribution and Funding
Direktur Risk Management

Haru Koesmahargyo*
Nixon Lambok Pahotan Napitupulu
Hirwandi Gafar
Nofry Rony Poetra

Eko Waluyo
Elisabeth Novie Riswanti
Andi Nirwoto
Jasmin
Setiyo Wibowo

* Berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dengan Akta nomor 16 tertanggal 16 Maret 2023, perseroan memberhentikan dengan hormat Haru Koesmahargyo selaku Direktur Utama Perseroan.

1. GENERAL (continued)

**i. Boards of Commissioners, Directors, Sharia
Supervisory Board, Audit Committee and
Employees (continued)**

Based on the Bank's The Annual General Meeting of Shareholders held on March 16, 2023, as stated under the notarial No. 16 by Notary Ashoya Ratam, SH., MKn, the composition of the Bank's Board of Directors are as follows:

December 31, 2023

President Director
Vice President Director
Director of IT and Digital
Director of Assets Management
Director of Distribution and Funding
Director of Risk Management
Director of Consumer
Director Finance
Director of Human Capital,
Compliance and Legal
Director of Institutional Banking

* Receive assignment transfer as President Director of The Board of Directors of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk based on the Annual General Meeting of Shareholders dated March 16, 2023 and has been effective on June 7, 2023 based on Financial Service Authority's Decision No. KEPR-44/D.03/2023 dated June 7, 2023.

** Appointed as Vice President Director of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk based on the Annual General Meeting of Shareholders dated March 16, 2023 and has been effective on June 7, 2023 based on Financial Service Authority's Decision No. KEPR-45/D.03/2023 dated June 7, 2023.

*** Appointed as a member of Board of Directors of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk based on the Annual General Meeting of Shareholders dated March 16, 2023 and has been effective on July 26, 2023 based on Financial Service Authority's Decision No. KEPR-83/D.03/2023 dated July 26, 2023.

Based on the Bank's The Annual General Meeting of Shareholders held on March 2, 2022, as stated under the notarial No. 04 by Notary Ashoya Ratam, SH., MKn, the composition of the Bank's Board of Directors are as follows:

December 31, 2022

President Director
Vice President Director
Director of Consumer
Director of Finance
Director of Human Capital,
Compliance and Legal
Director of Assets Management
Director of IT and Digital
Director of Distribution and Funding
Director of Risk Management

* Based on Annual General Meeting of Shareholders with notarial deed number 16 dated March 16, 2023, the company terminate with honor Haru Koesmahargyo as President Director.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

i. Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Komite Audit dan Karyawan (lanjutan)

Gaji dan kompensasi lainnya yang dibayarkan kepada dewan komisaris adalah sebesar Rp64.480 dan Rp51.960 masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (Catatan 43b). Gaji dan kompensasi lainnya yang dibayarkan kepada direksi adalah sebesar Rp161.529 dan Rp131.671 masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (Catatan 43b).

Sekretaris Perusahaan dan Kepala Divisi Audit Internal Bank adalah sebagai berikut:

31 Desember 2023

Sekretaris Perusahaan
Kepala Divisi Audit Internal

Ramon Armando*
Hendratno Tri Wibowo

* Diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank No. 231/DIR/2023 tanggal 14 April 2023 dan bertindak sebagai pejabat sejak tanggal 14 April 2023.

31 Desember 2022

Sekretaris Perusahaan
Kepala Divisi Audit Internal

Achmad Chaerul*
Hendratno Tri Wibowo**

* Diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank No. 711/DIR/2022 tanggal 7 Juli 2022 dan bertindak sebagai pejabat sejak tanggal 11 Juli 2022.

** Diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank No. 642/DIR/2021 tanggal 26 Juli 2021 dan bertindak sebagai pejabat sejak tanggal 26 Juli 2021.

Susunan Dewan Pengawas Syariah Bank, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Bank tanggal 16 Maret 2023, dengan berita acara No. 16 yang dibuat oleh Notaris Ashoya Ratam, SH., MKn adalah sebagai berikut:

31 Desember 2023

Ketua
Anggota
Anggota

M. Quraish Shihab
Mohammad Bagus Teguh Perwira
Muhammad Faiz*

* Diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk berdasarkan hasil keputusan RUPS Tahunan Perseroan tanggal 16 Maret 2023, telah memperoleh persetujuan OJK pada tanggal 18 Oktober 2023 berdasarkan Surat OJK No. S-267/PB.02/2023 tanggal 18 Oktober 2023 dan efektif sejak persetujuan Dewan Komisaris tanggal 29 November 2023 berdasarkan Surat Dewan Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk No. 144/KOM/BTN/XI/2023 tanggal 29 November 2023.

1. GENERAL (continued)

i. Boards of Commissioners, Directors, Sharia Supervisory Board, Audit Committee and Employees (continued)

Salaries and other compensation benefits paid to the Board of Commissioners of the Bank amounted to Rp64,480 and Rp51,960 for the years ended December 31, 2023, and 2022, respectively (Note 43b). Salaries and other compensation benefits paid to the Board of Directors of the Bank amounted to Rp161,529 and Rp131,671 for the years ended December 31, 2023, and 2022, respectively (Note 43b).

The Bank's Corporate Secretary and the Head of Internal Audit Division are as follows:

December 31, 2023

Corporate Secretary
Head of Internal Audit Division

* Appointed based on the Bank's Board of Directors' Decision Letter No. 231/DIR/2023 dated April 14, 2023 and Head of Corporate Secretary Division since April 14, 2023.

December 31, 2022

Corporate Secretary
Head of Internal Audit Division

* Appointed based on the Bank's Board of Directors' Decision Letter No. 711/DIR/2022 dated July 7, 2022 and Head of Corporate Secretary Division since July 11, 2022.

** Appointed based on the Bank's Board of Directors' Decision Letter No. 642/DIR/2021 dated July 26, 2021 and as the Acting Task of Internal Audit Division Head since July 26, 2021.

The composition of the Bank's Sharia Supervisory Board based on the Bank's The Annual General Meeting of Shareholders held on March 16, 2023, as stated under the notarial No. 16 by Notary Ashoya Ratam, SH., MKn are as follows:

December 31, 2023

Chairman
Member
Member

* Appointed as a member of the Sharia Supervisory Board of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk based on the results of the Company's Annual GMS decision on March 16, 2023, having obtained OJK approval on October 18, 2023, based on OJK Letter No. S-267/PB.02/2023 dated October 18, 2023, and effective since the approval of the Board of Commissioners on November 29, 2023, based on the Letter of the Board of Commissioners of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk No. 144/KOM/BTN/XI/2023 dated November 29, 2023.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

1. UMUM (lanjutan)

i. Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Komite Audit dan Karyawan (lanjutan)

Susunan Dewan Pengawas Syariah Bank berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Bank tanggal 2 Maret 2022, dengan berita acara No. 4 yang dibuat oleh Notaris Ashoya Ratam, SH., MKn adalah sebagai berikut:

31 Desember 2022

Ketua	M. Quraish Shihab
Anggota	Mohamad Hidayat*
Anggota	Mohammad Bagus Tegus Perwira

* Berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dengan Akta nomor 16 tertanggal 16 Maret 2023, perseroan memberhentikan dengan hormat Mohamad Hidayat selaku Anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan.

Susunan Anggota Komite Audit Bank berdasarkan Surat Dewan Komisaris No. 101/KOM/BTN/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023 adalah sebagai berikut:

31 Desember 2023

Ketua merangkap anggota	Iqbal Latanro
Anggota	Sentot A. Sentausa
Anggota	Andin Hadiyanto
Anggota	Peter Eko Budi Darwito
Anggota	Endang A. Suprijatna

Susunan Anggota Komite Audit Bank berdasarkan Surat Dewan Komisaris No. 111/KOM/BTN/XI/2022 tanggal 16 November 2022 adalah sebagai berikut:

31 Desember 2022

Ketua merangkap anggota	Iqbal Latanro
Anggota	Ahdi Jumhari Luddin
Anggota	Andin Hadiyanto
Anggota	Sentot A. Sentausa*
Anggota	Adi Prakoso
Anggota	Peter Eko Budi Darwito**

* Diangkat sebagai anggota Komite Audit PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Bank No. 03/KOM/BTN/2022 tanggal 17 Maret 2022 dan berlaku efektif berdasarkan Surat OJK Nomor 31/KDK.03/2022 tertanggal 8 Agustus 2022.

** Diperpanjang masa jabatan sebagai anggota Komite Audit PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Bank No. 108/KOM/BTN/XI/2022 tanggal 9 November 2022

Berdasarkan ketentuan internal Bank, manajemen kunci Bank cakupannya adalah Dewan Komisaris, Komite Audit, Direksi, Kepala Kantor Wilayah, Kepala Divisi, dan Kepala Cabang. Jumlah karyawan tetap Bank pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah 11.270 dan 10.711 orang.

1. GENERAL (continued)

i. Boards of Commissioners, Directors, Sharia Supervisory Board, Audit Committee and Employees (continued)

The composition of the Bank's Sharia Supervisory Board based on the Bank's The Annual General Meeting of Shareholders held on March 2, 2022, as stated under the notarial No. 4 by Notary Ashoya Ratam, SH., MKn are as follows:

December 31, 2022

Chairman
Member
Member

* Based on Annual General Meeting of Shareholders with notarial deed number 16 dated March 16, 2023, the company terminate with honor Mohamad Hidayat as Member of Sharia Supervisory Board.

The composition of the Bank's Audit Committee, based on the Bank's Board of Commissioners' Decision No. 101/KOM/BTN/VIII/2023 dated August 14, 2023 are as follows:

December 31, 2023

Chairman concurrently as a Member
Member
Member
Member
Member

The composition of the Bank's Audit Committee, based on the Bank's Board of Commissioners' Decision No. 111/KOM/BTN/XI/2022 dated November 16, 2022 are as follows:

December 31, 2022

Chairman concurrently as a Member
Member
Member
Member
Member

* Appointed as a member of the Bank's Audit Committee PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk based on the Board of Commissioners Decision Letter No. 03/KOM/BTN/2022 dated March 17, 2022 and effective based on OJK Letter Number 31/KDK.03/2022 dated August 8, 2022.

** Appointed as a member of the Bank's Audit Committee PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk based on the Board of Commissioners Decision Letter No. 108/KOM/BTN/XI/2022 dated November 9, 2022

Based on the Bank's internal policy, key management consists of Board of Commissioners, Audit Committee, Board of Directors, Regional Office Head, Division Head, and Branch Manager. The Bank has permanent employees as of December 31, 2023 and 2022 of 11,270 and 10,711 employees, respectively.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan peraturan Bapepam-LK No. VIII.G.7 lampiran keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik".

Laporan keuangan disusun sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1 (Amandemen 2019), "Penyajian Laporan Keuangan".

Laporan keuangan unit syariah Bank yang didasarkan pada prinsip syariah disajikan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 101 (Revisi 2020) tentang "Penyajian Laporan Keuangan Syariah", PSAK No. 102 (Revisi 2020) tentang "Akuntansi Murabahah", PSAK No. 104 tentang "Akuntansi Istishna", PSAK No. 105 tentang "Akuntansi Mudharabah", PSAK No. 106 (Revisi 2020) tentang "Akuntansi Musyarakah" dan PSAK No. 107 tentang "Akuntansi Ijarah" yang menggantikan PSAK No. 59 tentang "Akuntansi Perbankan Syariah" yang berkaitan dengan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan untuk topik tersebut, PSAK No. 110 (Revisi 2020) tentang "Akuntansi Sukuk", PSAK No. 111 tentang "Akuntansi Wa'd" dan PSAK lain selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) (revisi 2013).

Laporan keuangan telah disajikan berdasarkan nilai historis, kecuali untuk beberapa akun yang dinilai menggunakan dasar pengukuran lain sebagaimana dijelaskan pada kebijakan akuntansi dari akun tersebut. Laporan keuangan disusun dengan dasar akrual, kecuali pendapatan dari *istishna* dan bagi hasil dari pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* serta laporan arus kas.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

a. Basis of Preparation of the Financial Statements

Statement of Compliance

The financial statements as of and for the year ended December 31, 2023 and 2022 were prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, which includes the Statements and Interpretations issued by the Financial Accounting Standards Board of the Indonesian Institute of Accountants and Bapepam-LK's Regulation No. VIII.G.7, Appendix of the Decision of the Chairman of Bapepam-LK No. KEP-347/BL/2012 dated June 25, 2012 regarding the "Guidelines on Financial Statements Presentations and Disclosures for Issuers or Public Companies".

The Financial Statements is presented in conformity with the Statement of Financial Accounting Standards ("SFAS") No.1 (Amendment 2019), "Presentation of Financial Statements".

The financial statements of the Bank's sharia unit have been presented in conformity with the Statement of Financial Accounting Standards ("SFAS") No. 101 (Revised 2020) on "Sharia Financial Statements Presentation", SFAS No. 102 (Revised 2020) on "Accounting for Murabahah", SFAS No. 104 on "Accounting for Istishna", SFAS No. 105 on "Accounting for Mudharabah", SFAS No. 106 (Revised 2020) on "Accounting for Musyarakah" and SFAS No. 107 on "Accounting for Ijarah", which supersede SFAS No. 59 on "Accounting for Sharia Banking" associated with recognition, measurement, presentation and disclosure for the respective topics, SFAS No. 110 (Revised 2020) on "Accounting for Sukuk", SFAS No. 111 on "Accounting for Wa'd" and other SFAS, as long as not contradict with sharia principles and the Indonesia Sharia Banking Accounting Guidelines (PAPSI) (revised 2013).

The Financial Statements have been prepared on a historical cost basis, except for some accounts that were assessed using another measurement basis as explained in the accounting policies of the account. The Financial Statements have been prepared on accrual basis, except for the revenue from *istishna* and the profit sharing from the *mudharabah* and *musyarakah* financing and the statement of cash flow.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan (lanjutan)

Pernyataan Kepatuhan (lanjutan)

Laporan arus kas disusun menggunakan metode langsung dan arus kas dikelompokkan atas dasar aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Kas dan setara kas terdiri dari kas, giro pada Bank Indonesia dan giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, Sertifikat Bank Indonesia dan Sertifikat Deposito Bank Indonesia, yang jatuh tempo dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal perolehan, sepanjang tidak digunakan sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima serta tidak dibatasi penggunaannya.

Mata uang penyajian yang digunakan dalam laporan keuangan adalah Rupiah (Rp), yang merupakan mata uang fungsional Bank. Angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan, kecuali dinyatakan lain dibulatkan dalam jutaan Rupiah.

Berdasarkan PSAK No. 51 (Revisi 2003) tentang "Akuntansi Kuasi-Reorganisasi", kuasi-reorganisasi merupakan prosedur akuntansi yang mengatur perusahaan merestrukturisasi ekuitasnya dengan menghilangkan defisit dan menilai kembali seluruh aset dan liabilitasnya berdasarkan nilai wajar. Dengan kuasi-reorganisasi, perusahaan mendapatkan awal yang baik (*fresh start*) dengan laporan posisi keuangan yang menunjukkan nilai sekarang dan tanpa dibebani defisit karena defisit dieliminasi menjadi nihil.

b. Perubahan Kebijakan Akuntansi

Pada tanggal 1 Januari 2023, terdapat standar baru dan penyesuaian atau amandemen terhadap beberapa standar yang masih berlaku dan berlaku efektif sejak tanggal tersebut yaitu sebagai berikut:

- Amendemen PSAK No. 1, "Penyajian Laporan Keuangan" tentang pengungkapan kebijakan akuntansi yang mengubah istilah "signifikan" menjadi "material" dan memberi penjelasan mengenai kebijakan akuntansi material";
- Amandemen PSAK No.1, "Penyajian Laporan Keuangan" tentang klasifikasi liabilitas;
- Amandemen PSAK No. 25, "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan" tentang definisi "estimasi akuntansi" dan penjelasannya;

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

a. Basis of Preparation of the Financial Statements (continued)

Statement of Compliance (continued)

The statement of cash flows has been prepared using direct method and the cash flows have been classified on the basis of operating, investing and financing activities. Cash and cash equivalents consist of cash, current accounts with Bank Indonesia and current accounts with other banks, placements with Bank Indonesia and other banks, Bank Indonesia Certificates and Deposits Certificates of Bank Indonesia maturing within 3 (three) months or less from the acquisition date provided they are neither pledged as collateral for borrowings nor restricted.

The presentation currency used in the financial statements is the Indonesian Rupiah (Rp), which is the Bank's functional currency. Unless otherwise stated, all figures presented in the financial statement are rounded off to millions of Rupiah.

Based on SFAS No. 51 (Revised 2003), "Accounting for Quasi-Reorganization", a quasi-reorganization is an accounting procedure that enables a company to restructure its equity by eliminating its deficit and revaluing all its assets and liabilities based on their fair values. Under a quasi-reorganization, a company will have a fresh start with its statement of financial position showing figures that represent present values and without the burden of a deficit because the deficit has been eliminated to nil.

b. Changes in Accounting Policy

On January 1, 2023, there were new standards and adjustments or amendments for several prevailing standards and effective since that date, as follows:

- Amendment of SFAS No. 1, "Presentation of Financial Statements" regarding disclosure of accounting policies that change the term "significant" to "material" and provide explanations of material accounting policies";
- Amendment of SFAS No.1, "Presentation of Financial Statements" regarding classification of liabilities;
- Amendment of SFAS No. 25, "Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors" regarding the definition of "accounting estimates" and their explanations;

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

b. Perubahan Kebijakan Akuntansi (lanjutan)

- d. Amandemen PSAK No. 16, "Aset Tetap" tentang hasil sebelum penggunaan yang diintensikan;
- e. Amandemen PSAK No. 46, "Pajak Penghasilan" tentang Pajak Tangguhan terkait Aset dan Liabilitas yang timbul dari Transaksi Tunggal yang diadopsi dari Amendemen IAS 12 *Income Taxes* tentang *Deferred Tax related to Assets and Liabilities arising from a Single Transaction*, dan
- f. Amendemen PSAK No. 107, "Akuntansi Ijarah";
- g. Amendemen PSAK 73: "Sewa" terkait liabilitas sewa pada transaksi jual dan sewa-balik.

Implementasi dari standar-standar tersebut tidak menghasilkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Bank dan tidak memiliki dampak yang material terhadap laporan keuangan konsolidasian di tahun berjalan atau tahun sebelumnya.

c. Kuasi-Reorganisasi

Berdasarkan PSAK No. 51 (Revisi 2003) tentang "Akuntansi Kuasi-Reorganisasi", kuasi-reorganisasi merupakan prosedur akuntansi yang mengatur perusahaan merestrukturisasi ekuitasnya dengan menghilangkan defisit dan menilai kembali seluruh aset dan liabilitasnya berdasarkan nilai wajar. Dengan kuasi-reorganisasi, perusahaan mendapatkan awal yang baik (*fresh start*) dengan laporan posisi keuangan yang menunjukkan nilai sekarang dan tanpa dibebani defisit karena defisit dieliminasi menjadi nihil.

Estimasi nilai wajar aset dan liabilitas dalam rangka kuasi-reorganisasi ditentukan berdasarkan informasi terbaik sesuai dengan karakteristik aset dan liabilitas yang bersangkutan atau nilai pasar aset dan liabilitas yang bersangkutan. Apabila nilai pasar tidak tersedia, estimasi nilai wajar dilakukan dengan mempertimbangkan harga aset sejenis, estimasi nilai sekarang atau arus kas yang didiskontokan. Untuk aset dan liabilitas tertentu, penilaian dilakukan sesuai PSAK terkait.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. Changes in Accounting Policy (continued)

- d. Amendment of SFAS No. 16, "Fixed Assets" regarding proceeds before intended use;
- e. Amendment of SFAS No. 46, "Income Tax" on Deferred Tax related to Assets and Liabilities arising from a Single Transaction which adopted from Amended IAS 12 *Income Taxes* on Deferred Tax related to Assets and Liabilities arising from a Single Transaction; and
- f. Amendment of SFAS No. 107, "Ijarah Accounting";
- g. Amendment of SFAS 73: "Leases" regarding lease liabilities in sale-and-lease back transaction.

The implementation of the above standards did not result in substantial changes to the Bank's accounting policies and had no material impact to the consolidated financial statements for current or prior financial years.

c. Quasi-Reorganization

Based on SFAS No. 51 (Revised 2003), "Accounting for Quasi-Reorganization", a quasi-reorganization is an accounting procedure that enables a company to restructure its equity by eliminating its deficit and revaluing all its assets and liabilities based on their fair values. Under a quasi-reorganization, a company will have a fresh start with its statement of financial position showing figures that represent present values and without the burden of a deficit because the deficit has been eliminated.

The fair value estimate for assets and liabilities under a quasi-reorganization is determined based on the best available information according to the characteristics of the related assets and liabilities or the market value for the related assets and liabilities. If the market value is not available, the fair value estimation is conducted by considering the value of similar assets, present value estimation, or discounted cash flows. For certain assets and liabilities, the valuation is conducted according to the related SFAS.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi

d. Transactions with related parties

Dalam menjalankan usahanya, Bank melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi seperti yang didefinisikan dalam PSAK No. 7 tentang "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi".

In the normal course of its business, the Bank enters into transactions with related parties which are defined under SFAS No. 7, "Related Party Disclosures".

Suatu pihak dianggap berelasi dengan Bank jika:

The Bank considers the following as its related parties:

- a) Suatu pihak yang secara langsung, atau tidak langsung yang melalui satu atau lebih perantara, suatu pihak (i) mengendalikan, atau dikendalikan oleh, atau berada di bawah pengendalian bersama, dengan Bank; (ii) memiliki pengaruh signifikan atas Bank; atau (iii) memiliki pengendalian bersama atas Bank;
- b) Suatu pihak yang berada dalam kelompok usaha yang sama dengan Bank;
- c) Suatu pihak yang merupakan ventura bersama di mana Bank sebagai *venturer*;
- d) Suatu pihak adalah anggota dari personil manajemen kunci Bank;
- e) Suatu pihak adalah anggota keluarga dekat dari individu yang diuraikan dalam butir (a) atau (d);
- f) Suatu pihak adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari Bank atau entitas terkait Bank;
- g) Suatu pihak adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama atau dipengaruhi signifikan oleh beberapa entitas, langsung maupun tidak langsung, individu seperti diuraikan dalam butir (d) atau (e).

- a) A person who, directly or indirectly through one or more intermediaries, (i) controls, or is controlled by, or under common control with the Bank; (ii) has significant influence over the Bank; or (iii) has joint control over the Bank;*
- b) An entity which is a member of the same group as the Bank;*
- c) An entity which is a joint venture of a third party in which the Bank has ventured in;*
- d) A member of key management personnel of the Bank;*
- e) A close family member of the person described in clause (a) or (d);*
- f) An entity which is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the Bank or an entity related to the Bank;*
- g) An entity that is controlled, jointly controlled or significantly influenced, directly or indirectly by the person described in clause (d) or (e).*

Transaksi dengan pihak-pihak berelasi dilakukan dengan syarat dan kondisi yang disetujui oleh kedua belah pihak dimana persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan transaksi yang dilakukan dengan pihak ketiga. Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan dan rinciannya telah disajikan dalam Catatan 43 atas laporan keuangan. Selanjutnya, saldo dan transaksi yang material antara Bank dan Pemerintah Negara Republik Indonesia (RI) dan entitas lain yang berelasi dengan Bank diungkapkan juga pada Catatan 43.

Transactions with related parties are made on the term and conditions agreed by both parties where such terms may not be the same as transactions undertaken with third parties. All material transactions and balances with related parties are disclosed in the relevant notes to the financial statements and the details have been presented in Note 43 of the financial statements. Furthermore, material transactions and balances between the Bank and the Government of the Republic of Indonesia (RI) and other entities related to the Bank are also disclosed in Note 43.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Aset keuangan dan liabilitas keuangan

e. Financial assets and liabilities

Aset keuangan Bank terdiri dari kas, giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, efek-efek, obligasi Pemerintah, efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali, tagihan derivatif, tagihan akseptasi, penyertaan saham, kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah, bunga yang masih akan diterima dan aset lain-lain (tagihan kepada pihak ketiga).

The Bank's financial assets consist of cash, current accounts with Bank Indonesia, current accounts with other banks, placements with Bank Indonesia and other banks, securities, government bonds, securities purchased under agreement to resell, derivatives receivable, acceptance receivable, investment in shares, loans and sharia financing/receivables, interest receivable and other assets (third party receivables).

Liabilitas keuangan Bank terdiri dari liabilitas segera, simpanan dari nasabah, simpanan dari bank lain, surat-surat berharga yang diterbitkan, liabilitas derivatif, liabilitas akseptasi, pinjaman yang diterima, pinjaman subordinasi, efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali, bunga yang masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain (setoran jaminan dan dana jaminan pengembang).

The Bank's financial liabilities consist of liabilities due immediately, deposits from customers, deposits from other banks, securities issued, derivatives payable, acceptance payable, fund borrowings, subordinated loan, securities sold under repurchase agreements, interest payable and other liabilities (guarantee deposits and developers' security deposits).

(i) Klasifikasi

(i) Classification

Bank mengklasifikasikan aset keuangan berdasarkan kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal:

The Bank classified its financial assets in the following categories on initial recognition:

- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;
- Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi;
- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (FVTOCI).

- Financial assets held at fair value through profit or loss (FVTPL);
- Financial assets held at amortized cost;
- Financial assets held at fair value through other comprehensive income (FVTOCI).

Aset keuangan diklasifikasikan menjadi kategori tersebut di atas berdasarkan model bisnis dimana aset keuangan tersebut dimiliki, dan karakteristik arus kas kontraktualnya.

Financial assets are classified into these categories based on the business model within which they are held, and their contractual cash flow characteristics.

Model bisnis merefleksikan bagaimana kelompok aset keuangan dikelola untuk mencapai tujuan bisnis tertentu.

The business model reflects how groups of financial assets are managed to achieve a particular business objective.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

e. Financial assets and liabilities (continued)

(i) Klasifikasi (lanjutan)

(i) Classification (continued)

Bank melakukan pengujian karakteristik arus kas kontraktual dari aset keuangan yang dikelola untuk mengetahui karakteristik arus kas kontraktual berasal hanya dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang (*Solely Payment of Principal and Interest* atau *Pass SPPI*) yang konsisten dengan pengaturan pinjaman dasar (*Basic Lending Agreement*). Dalam melakukan penilaian, Bank mempertimbangkan:

The Bank assess the contractual cash flow characteristics of financial assets to determine the characteristics of contractual cash flows only from the payment of principal and interest from the outstanding principal (*Solely Payment of Principal and Interest or Pass SPPI*) that is consistent with basic lending agreement. In making the assessment, the Bank considers:

- Imbalan untuk nilai waktu dari uang;
- *Leverage*;
- Variabilitas pada waktu dan jumlah arus kas;
- Instrumen yang terkait secara kontraktual;
- Pembayaran dipercepat;
- Ketentuan kontrak tidak sah dan *de minimis*

- *The time value of money element of interest*;
- *Leverage*;
- *Variability in timing or amount of cash flows*;
- *Contractually linked instruments*;
- *Prepayment*;
- *Non-genuine features and de minimis*.

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan amortisasi jika kedua kondisi berikut terpenuhi:

Financial assets are measured at amortized cost if both of the following conditions are met:

- Aset keuangan yang dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- Arus kas kontraktual tersebut semata dari pembayaran pokok dan bunga (SPPI).

- *Financial assets are managed where the business model objectives in order to collect the contractual cash flows; and*
- *The contractual cash flows are solely payments of principal and interest (SPPI).*

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (FVTOCI) jika kedua kondisi berikut terpenuhi:

Financial assets are measured at fair value through other comprehensive income (FVTOCI) if both of the following conditions are met:

- Aset keuangan yang dikelola untuk mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan; dan
- Arus kas kontraktual tersebut semata dari pembayaran pokok dan bunga (SPPI).

- *Financial assets are managed to collect the contractual cash flows and sell the assets; and*
- *The contractual cash flows are solely payments of principal and interest (SPPI).*

Aset keuangan diklasifikasikan pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL) jika tidak memenuhi kondisi yang disyaratkan untuk diukur pada biaya perolehan amortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Financial assets are measured at fair value through profit or loss (FVTPL) if do not meet the conditions required to be measured at amortized cost or fair value through other comprehensive income.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

e. Financial assets and liabilities (continued)

(ii) Pengakuan awal

(ii) Initial recognition

- a. Pembelian atau penjualan aset keuangan yang memerlukan penyerahan aset dalam kurun waktu yang telah ditetapkan oleh peraturan dan kebiasaan yang berlaku di pasar (pembelian secara reguler) diakui pada tanggal penyelesaian.
- b. Aset keuangan dan liabilitas keuangan pada awalnya diukur pada nilai wajarnya. Dalam hal aset keuangan atau liabilitas keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Nilai wajar tersebut ditambah/dikurangkan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung. Pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasinya.

- a. Purchases or sales of financial assets that require delivery of assets within a time frame established by regulation or convention in the marketplace (regular way purchases) are recognized on the settlement date.
- b. Financial assets and liabilities are initially recognised at fair value. For those financial assets or financial liabilities not measured at fair value through profit or loss. The fair value includes directly attributable transaction costs. The subsequent measurement of financial assets and liabilities depends on their classification.

Biaya transaksi hanya meliputi biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk perolehan suatu aset keuangan atau penerbitan suatu liabilitas keuangan dan merupakan biaya tambahan yang tidak akan terjadi apabila instrumen keuangan tersebut tidak diperoleh atau diterbitkan. Untuk aset keuangan, biaya transaksi ditambahkan pada jumlah yang diakui pada awal pengakuan aset, sedangkan untuk liabilitas keuangan, biaya transaksi dikurangkan dari jumlah utang yang diakui pada pengakuan awal liabilitas.

Transaction costs only include costs that are directly attributable to the acquisition of a financial asset or issuance of a financial liability and an additional charge that would not occur if the instrument is not acquired or issued. For financial assets, transaction costs are added to the amount recognized in the initial recognition of the asset, while for financial liabilities, transaction costs are deducted from the amount of debt recognized on initial recognition of a liability.

Biaya transaksi tersebut diamortisasi selama umur instrumen berdasarkan metode suku bunga efektif dan dicatat sebagai bagian dari pendapatan bunga untuk biaya transaksi sehubungan dengan aset keuangan atau sebagai bagian dari beban bunga untuk biaya transaksi sehubungan dengan liabilitas keuangan.

The transaction costs are amortized over the terms of the instrument based on the effective interest rate method and recorded as part of interest income for transaction costs related to the financial asset or as part of interest expense for transaction costs related to financial liabilities.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

e. Financial assets and liabilities (continued)

(ii) Pengakuan awal (lanjutan)

(ii) Initial recognition (continued)

Bank, pada pengakuan awal, dapat menetapkan aset keuangan dan liabilitas keuangan tertentu sebagai nilai wajar melalui laba rugi (opsi nilai wajar). Opsi nilai wajar dapat digunakan hanya bila memenuhi ketentuan sebagai berikut:

The Bank, upon initial recognition, may designate certain financial assets and liabilities, at fair value through profit or loss (fair value option). The fair value option is only applied when the following conditions are met:

- Penetapan sebagai opsi nilai wajar mengurangi atau mengeliminasi ketidak-konsistenan pengukuran dan pengakuan (*accounting mismatch*) yang dapat timbul; atau
- Aset keuangan dan liabilitas keuangan merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan yang risikonya dikelola dan dilaporkan kepada manajemen kunci berdasarkan nilai wajar; atau
- Aset keuangan dan liabilitas keuangan terdiri dari kontrak utama dan derivatif melekat yang harus dipisahkan.

- The determination of the fair value option reduces or eliminates an accounting mismatch that would otherwise arise; or
- The financial assets and liabilities are part of a portfolio of financial instruments, the risks of which are managed and reported to key management on a fair value basis; or
- The financial assets and liabilities consist of a host contract and an embedded derivative that must be bifurcated.

Opsi nilai wajar digunakan untuk kredit yang diberikan dan piutang tertentu yang dilindungi nilai menggunakan *credit derivatives* atau *spot* suku bunga, namun tidak memenuhi kriteria untuk akuntansi lindung nilai. Jika tidak, kredit yang diberikan akan dicatat menggunakan biaya perolehan diamortisasi dan derivatif akan diukur menggunakan nilai wajar melalui laba rugi.

The fair value option is applied to certain loans and receivables that are hedged with credit derivatives or interest rate spot, but does not meet the criteria for hedge accounting. Otherwise, the loans would be recorded at amortized cost, while the derivatives are measured at fair value through profit or loss.

Opsi nilai wajar juga digunakan untuk dana investasi yang merupakan bagian dari portofolio yang dikelola dengan basis nilai wajar. Opsi nilai wajar juga digunakan untuk *structured investment* termasuk derivatif melekat.

The fair value option is also applied to investment funds that are part of a portfolio managed on a fair value basis. Furthermore, the fair value option is applied to structured investments that include embedded derivatives.

(iii) Pengukuran setelah pengakuan awal

(iii) Subsequent measurement

Aset keuangan dalam kelompok nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi diukur pada nilai wajarnya.

Fair value through other comprehensive income financial assets and financial assets and liabilities measured at fair value through profit or loss are subsequently measured at fair value.

Aset dan liabilitas keuangan lainnya yang diukur pada biaya perolehan amortisasi, diukur pada biaya perolehan amortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Assets and other financial liabilities which are measured at amortized cost, are measured at amortized cost using the effective interest method.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

e. Financial assets and liabilities (continued)

(iv) Penghentian pengakuan

(iv) Derecognition

a. Aset keuangan dihentikan pengakuannya jika:

a. Financial assets are derecognized when:

- Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau
- Bank telah mentransfer hak-nya untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan atau menanggung liabilitas untuk membayarkan arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa penundaan berarti kepada pihak ketiga di bawah kesepakatan pelepasan (*pass-through arrangement*); dan antara (a) Bank telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, atau (b) Bank tidak mentransfer maupun tidak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, namun telah mentransfer pengendalian atas aset.

- The contractual rights to receive cash flows from the financial assets have expired; or
- The Bank has transferred its rights to receive cash flows arising from the financial assets or has assumed an obligation to pay the cash flows in full without significant delay to a third party under a 'pass-through arrangement'; and either (a) the Bank has transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or (b) the Bank has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred the control of the asset.

Ketika Bank telah mentransfer hak untuk menerima arus kas dari aset atau telah memasuki *pass through arrangement* dan tidak mentransfer serta tidak mempertahankan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset atau tidak mentransfer kendali atas aset, aset diakui sebesar keterlibatan Bank yang berkelanjutan atas aset tersebut.

When the Bank has transferred its rights to receive cash flows from an asset or has entered into a *pass-through arrangement* and has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset nor transferred control of the asset, the asset is recognized to the extent of the Bank's continuing involvement in the asset.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

e. Financial assets and liabilities (continued)

(iv) Penghentian pengakuan (lanjutan)

(iv) Derecognition (continued)

- a. Aset keuangan dihentikan pengakuannya jika: (lanjutan)
 Kredit yang diberikan atau aset keuangan lain dihapusbukukan ketika tidak terdapat prospek yang realistis mengenai pengembalian kredit dalam waktu dekat atau hubungan normal antara Bank dan debitur telah berakhir. Kredit yang tidak dapat dilunasi, dihapusbukukan dengan mendebit cadangan kerugian penurunan nilai. Penerimaan kemudian atas kredit yang telah dihapusbukukan sebelumnya, jika pada periode berjalan dikreditkan ke dalam akun cadangan kerugian penurunan nilai atas kredit yang diberikan di laporan posisi keuangan, sedangkan jika setelah tanggal laporan posisi keuangan dikreditkan sebagai pendapatan operasional lainnya dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.
- b. Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas keuangan tersebut berakhir, yaitu ketika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

- a. Financial assets are derecognized when: (continued)
 Loans or other financial assets are written off when there is no realistic prospect of collection in the near future or the normal relationship between the Bank and the borrowers has ceased to exist. When a loan is deemed uncollectible, it is written off against the related allowance for impairment losses. Subsequent recoveries from loans previously written off, are added to the allowance for impairment losses account in the statement of financial position, if recovered in the current year and are recognized in the statement of profit or loss and comprehensive income as other operating income, if recovered after the statement of financial position dates.
- b. Financial liabilities are derecognized when they are extinguished, i.e., liabilities stated in the contract are discharged, cancelled or expired.

Jika suatu liabilitas keuangan yang ada digantikan dengan yang lain oleh pemberi pinjaman yang sama pada keadaan yang secara substansial berbeda, atau berdasarkan suatu liabilitas yang ada yang secara substansial telah diubah, seperti pertukaran atau modifikasi yang diperlakukan sebagai penghentian pengakuan liabilitas awal dan pengakuan liabilitas baru dan perbedaan nilai tercatat masing-masing diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Where an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as derecognition of the original liability and the recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognised in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

e. Financial assets and liabilities (continued)

(v) Modifikasi atas Arus Kas Aset Keuangan

(v) Modifications to Cash Flow of Financial Assets

Penilaian apakah suatu aset keuangan telah dimodifikasi baik secara substansial maupun tidak substansial dilakukan oleh unit bisnis yang berwenang melakukan modifikasi atau restrukturisasi aset keuangan pada saat unit bisnis tersebut melakukan tindakan modifikasi atau restrukturisasi atas suatu aset keuangan.

An assessment of whether a financial asset has been modified substantially or not substantially is carried out by a business unit authorized to modify or restructure financial assets when the business unit carries out modification or restructuring of a financial asset.

Modifikasi aset keuangan dianggap substansial dan Bank akan berhenti mengakui aset keuangan awal ketika:

Modifications to financial assets are considered substantial and the Bank will stop recognizing the original financial assets when:

- a. Aset keuangan (atau bagiannya) berakhir, yaitu jika debitur secara hukum dibebaskan dari tanggung jawab utama atas aset tersebut (atau bagiannya), baik melalui proses hukum maupun oleh kreditur pembuatan kontrak kredit baru (sebagai contoh, opsi *equity conversion*); atau

- a. The financial asset (or part thereof) expires, that is, if the debtor is legally released from primary responsibility for the asset (or part thereof), either through legal process or by the creditor entering into a new credit contract (for example, the equity conversion option); or

- b. Terdapat konversi mata uang.

- b. Currency conversion.

Bank kemudian akan mengukur aset keuangan yang telah dimodifikasi baik secara substansial maupun tidak substansial dengan cara berikut:

The bank will then measure the modified financial assets either substantially or not substantially in the following manner:

- a. Modifikasi Aset Keuangan yang Substansial:

- a. Substantial Modification of Financial Assets:

1. Saat arus kas kontraktual atas aset keuangan direnegosiasi atau dimodifikasi (antara lain ketika kredit direstrukturasikan) dimana renegosiasi atau modifikasi tersebut menghasilkan penghentian pengakuan aset keuangan, Bank akan mencatat aset keuangan tersebut sebagai aset keuangan baru/modifikasi pada tanggal modifikasi/negosiasi.

1. When the contractual cash flows on a financial asset are renegotiated or modified (for example, when a credit is restructured) where the renegotiation or modification results in derecognition of the financial asset, the Bank will record the financial asset as a new/modified financial asset at the modification/negotiation date.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

e. Financial assets and liabilities (continued)

(v) Modifikasi atas Arus Kas Aset Keuangan (lanjutan)

(v) Modifications to Cash Flow of Financial Assets (continued)

Bank kemudian akan mengukur aset keuangan yang telah dimodifikasi baik secara substansial maupun tidak substansial dengan cara berikut: (lanjutan)

The bank will then measure the modified financial assets either substantially or not substantially in the following manner: (continued)

a. Modifikasi Aset Keuangan yang Substansial: (lanjutan)

a. Substantial Modification of Financial Assets: (continued)

2. Selisih jumlah tercatat bruto aset keuangan awal dengan nilai wajar aset modifikasian diakui di laba rugi.

2. The difference between the gross carrying amount of the original financial asset and the fair value of the modified asset is recognized in profit or loss.

3. Pendapatan atau biaya transaksi yang terjadi sehubungan dengan kejadian modifikasi diakui sebagai bagian dari keuntungan atau kerugian atas modifikasi tersebut.

3. Income or costs incurred in connection with a modification event are recognized as part of the gain or loss on the modification.

4. Selanjutnya, Bank melakukan penilaian apakah aset keuangan baru/modifikasian merupakan aset yang berasal dari aset keuangan memburuk.

4. Subsequently, the Bank assesses whether the new/modified financial assets are those that arise from deteriorating financial assets.

5. Pengakuan pendapatan bunga atas aset yang berasal dari aset keuangan memburuk ditentukan berdasarkan suku bunga efektif yang telah disesuaikan dengan risiko kredit (*risk-adjusted effective interest rate*) untuk mendiskontokan arus kas aset keuangan yang telah dimodifikasi.

5. Recognition of interest income on assets originating from deteriorating financial assets is determined based on the risk-adjusted effective interest rate to discount the cash flows of modified financial assets.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(v) Modifikasi atas Arus Kas Aset Keuangan (lanjutan)

b. Modifikasi Aset Keuangan yang Tidak Substansial:

1. Saat Bank melakukan renegotiasi atau modifikasi arus kas kontraktual atas aset keuangan (antara lain ketika kredit direstrukturisasi) yang tidak memenuhi kriteria modifikasi aset keuangan yang substansial di atas, maka renegotiasi atau modifikasi tersebut tidak menghasilkan penghentian pengakuan aset keuangan.
2. Jumlah tercatat bruto aset keuangan dihitung sebesar nilai kini (*net present value*) dari arus kas kontraktual yang telah dimodifikasi atau direnegosiasi yang didiskontokan menggunakan suku bunga efektif awal.
3. Bank kemudian mengakui keuntungan atau kerugian dari modifikasi (yaitu sebesar perubahan jumlah tercatat bruto aset keuangan) dalam laporan laba rugi.
4. Pendapatan atau biaya transaksi yang terjadi sehubungan dengan kejadian modifikasi diakui sebagai penyesuaian terhadap jumlah tercatat aset keuangan yang telah dimodifikasi dan diamortisasi selama sisa jangka waktu aset keuangan modifikasi tersebut

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Financial assets and liabilities (continued)

(v) Modifications to Cash Flow of Financial Assets (continued)

b. Non-Substantial Modification of Financial Assets:

1. When the Bank renegotiates or modifies contractual cash flows for financial assets (among others when credit is restructured) that do not meet the criteria for substantial modification of financial assets above, the renegotiation or modification does not result in derecognition of financial assets.
2. The gross carrying amount of financial assets is computed at the net present value of modified or renegotiated contractual cash flows discounted at the original effective interest rate.
3. The Bank then recognizes the gain or loss from the modification (i.e. the change in the gross carrying amount of the financial asset) in the profit or loss.
4. Transaction income or costs incurred in connection with a modification event are recognized as an adjustment to the carrying amount of the modified financial asset and amortized over the remaining term of the modified financial asset.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**e. Aset keuangan dan liabilitas keuangan
(lanjutan)**

e. Financial assets and liabilities (continued)

(vi) Pengakuan pendapatan dan beban

(vi) Income and expense recognition

- a. Pendapatan dan beban bunga atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain serta aset keuangan dan liabilitas keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi, diakui pada laporan laba rugi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

- a. Interest income and expense on financial assets measured at fair value through other comprehensive income as well as financial assets and financial liabilities recorded at amortized cost are recognized in the statement of profit or loss using the effective interest method.

Jumlah tercatat bruto aset keuangan adalah biaya perolehan diamortisasi aset keuangan sebelum disesuaikan dengan cadangan penurunan nilai.

The gross carrying amount of a financial asset is the amortized cost of a financial asset before adjusting for allowance for impairment.

Dalam menghitung pendapatan dan beban bunga, tingkat bunga efektif diterapkan pada jumlah tercatat bruto aset (ketika aset tersebut bukan aset keuangan memburuk) atau terhadap biaya perolehan diamortisasi dari liabilitas.

In calculating interest income and expenses, the effective interest rate is applied to the gross carrying amount of an asset (when the asset is not a deteriorated financial asset) or to the amortized cost of a liability.

Untuk aset keuangan yang memburuk setelah pengakuan awal, pendapatan bunga dihitung dengan menerapkan tingkat bunga efektif terhadap biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan tersebut. Jika aset tersebut tidak lagi memburuk, maka perhitungan pendapatan bunga akan dihitung dengan menerapkan tingkat bunga efektif terhadap nilai tercatat bruto dari aset keuangan tersebut.

For financial assets that deteriorated after initial recognition, interest income is calculated by applying an effective interest rate to the amortized cost of the financial assets. If the asset no longer deteriorates, the calculation of interest income will be calculated by applying an effective interest rate to the gross carrying amount of the financial asset.

Untuk aset keuangan yang telah memburuk pada saat pengakuan awal, pendapatan bunga dihitung dengan menerapkan tingkat bunga efektif terhadap biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan tersebut. Jika aset tersebut tidak lagi memburuk, maka perhitungan pendapatan bunga akan tetap dihitung dengan menerapkan tingkat bunga efektif terhadap biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan tersebut.

For financial assets that have deteriorated at initial recognition, interest income is calculated by applying the effective interest rate to the amortized cost of the financial assets. If the asset no longer deteriorates, the calculation of interest income will still be calculated by applying the effective interest rate to the amortized cost of the financial asset.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

e. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(vi) Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)

- b. Keuntungan dan kerugian atas aset keuangan (yaitu: instrumen utang yang dimiliki oleh Bank) yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (FVTOCI) diakui dalam penghasilan komprehensif lain, kecuali untuk kerugian penurunan nilai, sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya, keuntungan atau kerugian kumulatif yang telah diakui sebelumnya dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi.

Keuntungan dan kerugian atas aset keuangan atau liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL) diakui dalam laporan laba rugi, kecuali:

- Bagian dari hubungan lindung nilai;
- Investasi dalam instrumen ekuitas dan Bank telah memilih untuk menyajikan keuntungan dan kerugian atas investasi dalam penghasilan komprehensif lain;
- Liabilitas keuangan yang ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan Bank disyaratkan untuk menyajikan dampak dari perubahan risiko kredit liabilitas dalam penghasilan komprehensif lain;
- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan Bank disyaratkan untuk mengakui sebagian perubahan nilai wajar dalam penghasilan komprehensif lain.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Financial assets and liabilities (continued)

(vi) Income and expense recognition (continued)

- b. Gain and losses on financial assets (which is debt instrument held by Bank) measured at fair value through other comprehensive income (FVTOCI) are recognized at other comprehensive income, except losses on impairment, until those financial instrument derecognized, unrealized gain and losses record on other comprehensive income reclassified from equity to profit and loss as reclassification adjustment.

Gain and losses on financial assets or financial liabilities measured at fair value through profit or loss (FVTPL) are recognized at statement of profit or loss, except:

- Part of a hedging relationship;
- Investments in equity instruments and the Bank has chosen to present gains and losses on investment in other comprehensive income;
- Financial liabilities determined to be measured at fair value through profit or loss and the Bank is required to present the impact of changes in credit risk liabilities in other comprehensive income;
- Financial assets measured at fair value through other comprehensive income and the Bank is required to recognize some changes in fair value in the other comprehensive income.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

e. Financial assets and liabilities (continued)

(vi) Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)

(vi) Income and expense recognition (continued)

Keuntungan atau kerugian atas aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan amortisasi dan bukan merupakan bagian dari suatu hubungan lindung nilai diakui pada laporan laba rugi ketika aset keuangan dihentikan pengakuannya, direklasifikasi, melalui proses amortisasi atau dalam rangka mengakui keuntungan atau kerugian penurunan nilai.

Gain or losses on financial assets measured at amortized cost and not part of a hedging relationship are recognized in the statement of profit or loss when the financial assets are derecognized, reclassified, through the amortization process or in order to recognize impairment gains or losses.

Keuntungan atau kerugian dari liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan amortisasi dan bukan merupakan bagian dari suatu hubungan lindung nilai diakui dalam laporan laba rugi ketika liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya dan melalui proses amortisasi.

Gain or losses on liabilities instrument measured at amortized cost and not part of a hedging relationship are recognized in the statement of profit or loss when liabilities instrument are derecognized and through amortization processed.

(vii) Reklasifikasi aset keuangan

(vii) Reclassification of financial assets

Reklasifikasi aset keuangan diperbolehkan jika dan hanya jika terjadi perubahan dalam model bisnis untuk mengelola aset keuangan.

Reclassification of financial assets is permissible when and only when there is change in business model for managing financial assets.

Jika Bank mereklasifikasi aset keuangan sesuai dengan ketentuan di atas, Bank menerapkan reklasifikasi secara prospektif dari tanggal reklasifikasi. Bank tidak menyajikan kembali keuntungan, kerugian (termasuk keuntungan atau kerugian penurunan nilai), atau bunga yang diakui sebelumnya.

If the Bank reclassifies financial assets in accordance with the above conditions, the Bank applies prospective reclassification from the date of reclassification. The Bank does not restate gains, losses (including impairment gains or losses), or previously recognized interest.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi ke klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi dicatat sebesar nilai wajarnya. Selisih antara nilai tercatat dengan nilai wajar diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada laba rugi.

Reclassifications of financial assets from amortized cost classifications to fair value through profit or loss are recorded at fair value. The difference between the recorded value and fair value is recognized in profit or loss on the statement of profit or loss and other comprehensive income.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

e. Financial assets and liabilities (continued)

(vii) Reklasifikasi aset keuangan (lanjutan)

(vii) Reclassification of financial assets (continued)

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi ke klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dicatat sebesar nilai wajarnya.

Reclassifications of financial assets from amortized cost classifications to fair value classifications through other comprehensive are recorded at their fair values.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ke klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi dicatat pada wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi direklasifikasi ke laba rugi.

Reclassification of financial assets from fair value classification through other comprehensive income to fair value classification through profit or loss is recorded at fair value. Unrealized gains or losses are reclassified to profit or loss.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ke klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi dicatat pada nilai tercatat. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi dihapus dari ekuitas dan disesuaikan terhadap nilai wajar.

Reclassification of financial assets from fair value classifications through other comprehensive income to the amortized cost classification is recorded at carrying value. Unrealized gains or losses is removed from equity and is adjusted against the fair value.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi ke klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dicatat pada wajar.

Reclassifications on financial assets from fair value classification through profit or loss to fair value classification through other comprehensive income are recorded at fair value.

Reklasifikasi aset keuangan dari kelompok dimiliki hingga jatuh tempo ke kelompok tersedia untuk dijual dicatat sebesar nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi tetap dilaporkan dalam ekuitas dan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif selama sisa umur aset keuangan tersebut.

Reclassification of financial assets from held-to-maturity to available-for-sale category is recorded at fair value. Unrealized gains or losses are reported in equity and are amortized using effective interest method over the remaining life of the financial assets.

(viii) Saling hapus

(viii) Offsetting

Aset keuangan dan liabilitas keuangan dilakukan saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika Bank memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya maksud untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara simultan.

Financial assets and liabilities are offset and the net amount is presented in the statement of financial position when, and only when, the Bank has a legal right to offset the amounts and intends either to settle on a net basis or to realize the asset and settle the liability simultaneously.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

**e. Aset keuangan dan liabilitas keuangan
(lanjutan)**

e. Financial assets and liabilities (continued)

(viii) Saling hapus (lanjutan)

(viii) Offsetting (continued)

Hal yang berkekuatan hukum harus tidak kontingen atas peristiwa di masa depan dan harus dapat dipaksakan di dalam situasi bisnis yang normal, peristiwa kegagalan atau kebangkrutan dari entitas atas seluruh pihak lawan.

The legally enforceable right must not be, contingent on future events and must be enforceable in the normal course of business and in the event of default, insolvency or bankruptcy of the company or the counterparty.

Pendapatan dan beban disajikan dalam jumlah neto hanya jika diperkenankan oleh Standar Akuntansi Keuangan.

Income and expenses are presented on a net basis only when permitted by the Financial Accounting Standards.

(ix) Pengukuran nilai wajar

(ix) Fair value measurement

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date.

Pengukuran nilai wajar mengasumsikan bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas terjadi:

Fair value measurement assumes the transaction to sell assets or transfer liabilities occurs:

- Di pasar utama untuk aset dan liabilitas tersebut; atau
- Jika tidak terdapat pasar utama, dipasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

- In the primary market for such assets and liabilities; or
- If there is no primary market, in the most profitable market for these assets or liabilities.

Nilai wajar suatu aset atau liabilitas diukur menggunakan asumsi yang akan digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga aset dan liabilitas tersebut dengan asumsi bahwa pelaku pasar bertindak dalam kepentingan ekonomik terbaiknya.

The fair value of an asset or liability is measured using the assumptions that would be use by market participants in determining the price of the asset and the liability assuming that market participants act in their best economic interests.

Pengukuran nilai wajar aset non keuangan memperhitungkan kemampuan pelaku pasar untuk menghasilkan manfaat ekonomik dengan menggunakan aset dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya atau dengan menjualnya kepada pelaku pasar lain yang akan menggunakan aset tersebut dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya.

The measurement of the fair value of non-financial assets takes into account the ability of market participants to generate economic benefits by using the asset in the highest and best use or by selling them to other market participants that would use the asset in the highest and best use.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

e. Financial assets and liabilities (continued)

(ix) Pengukuran nilai wajar (lanjutan)

(ix) Fair value measurement (continued)

Bank menggunakan teknik penilaian yang sesuai dalam keadaan dan dimana data yang memadai tersedia untuk mengukur nilai wajar, mengoptimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

Bank uses suitable valuation techniques in the circumstances and where sufficient data are available to measure fair value, optimizing the use of relevant observable inputs and minimize the use of inputs that are not observable.

Semua aset dan liabilitas dimana nilai wajar diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan dapat dikategorikan pada level hirarki nilai wajar, berdasarkan tingkatan input terendah yang signifikan atas pengukuran nilai wajar secara keseluruhan:

All assets and liabilities which fair value is measured or disclosed in the financial statements can be classified in fair value hierarchy levels, based on the lowest level of input that is significant to the overall fair value measurement:

- Tingkat 1 : harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses pada tanggal pengukuran.
- Tingkat 2 : input selain harga kuotasian yang termasuk dalam level 1 yang dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas, baik secara langsung atau tidak langsung.
- Tingkat 3 : input yang tidak dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas.

- *Level 1 : quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities which are accessible at the measurement date.*

- *Level 2 : inputs other than quoted prices included in level 1 that are observable for the assets and liabilities, either directly or indirectly.*

- *Level 3 : inputs that are not observable for the assets and liabilities.*

Untuk aset dan liabilitas yang diakui pada laporan keuangan secara berulang, Bank menentukan apakah terjadi transfer antara level di dalam hirarki dengan cara mengevaluasi kategori (berdasarkan input level terendah yang signifikan dalam pengukuran nilai wajar) setiap akhir periode pelaporan.

For assets and liabilities that are recognized in the financial statements on recurring basis, the Bank determines whether there is a transfer between levels in the hierarchy by evaluating categories (based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement) at the end of each reporting period.

Bank, untuk tujuan pengungkapan nilai wajar, telah menentukan kelas aset dan liabilitas berdasarkan sifat, karakteristik, risiko aset dan liabilitas, dan level hirarki nilai wajar (Catatan 47).

The Bank, for purposes of disclosing the fair value, has determined the classes of assets and liabilities based on the nature, characteristics, risk of assets and liabilities, and the fair value hierarchy levels (Note 47).

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

e. Financial assets and liabilities (continued)

(x) Pengukuran biaya perolehan diamortisasi

(x) Amortized cost measurement

Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan adalah jumlah aset keuangan atau liabilitas keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok pinjaman, ditambah atau dikurangi amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai pengakuan awal dan nilai jatuh temponya, dan dikurangi penurunan nilai.

The amortized cost of a financial asset or liability is the amount at which the financial asset or liability is measured at initial recognition, minus principal repayments, plus or minus the cumulative amortization using the effective interest method of any difference between the initial amount recognized and the maturity amount, minus any reduction for impairment.

(xi) Aset keuangan sukuk

(xi) Sukuk Financial Asset

Berdasarkan PSAK No.110 (Revisi 2015), Bank menentukan investasi pada sukuk *ijarah* dan *mudharabah* sebagai diukur pada biaya perolehan, diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain atau diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

In accordance with SFAS No.110 (Revised 2015), the Bank determines the classification of investments in sukuk *ijarah* and *mudharabah* either measured at cost, fair value through other comprehensive income or fair value through profit or loss.

Klasifikasi sukuk adalah sebagai berikut:

Sukuk classifications are as follows:

- a. Diukur pada biaya perolehan
- Investasi tersebut dimiliki dalam suatu model usaha yang bertujuan utama untuk memperoleh arus kas kontraktual dan terdapat persyaratan kontraktual dalam menentukan tanggal tertentu atas pembayaran pokok dan atau hasilnya.
 - Biaya perolehan sukuk termasuk biaya transaksi, dan selisih antara biaya perolehan dan nilai nominal diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu sukuk dan diakui dalam laba rugi.

- a. Measured at cost
- The investment is held in a business model whereby the primary goal is to obtain contractual cash flows and has contractual terms in determining the specific date of principal payments and or the results.
 - Sukuk acquisition cost includes transaction cost, and difference between the acquisition cost and the nominal value is amortized on a straight-line basis over the period of the sukuk and recognized to profit or loss.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Aset keuangan dan liabilitas keuangan (lanjutan)

e. Financial assets and liabilities (continued)

(xi) Aset keuangan sukuk (lanjutan)

(xi) Sukuk Financial Asset (continued)

Klasifikasi sukuk adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Sukuk classifications are as follows: (continued)

b. Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain

b. Measured at fair value through other comprehensive income

- Investasi tersebut dimiliki dalam suatu model usaha yang bertujuan utama untuk memperoleh arus kas kontraktual dan melakukan penjualan sukuk, terdapat persyaratan kontraktual dalam menentukan tanggal tertentu atas pembayaran pokok dan atau hasilnya.
- Biaya perolehan sukuk termasuk biaya transaksi, dan selisih antara biaya perolehan dan nilai nominal diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu sukuk dan diakui dalam laba rugi.
- Keuntungan atau kerugian dari perubahan nilai wajar diakui dalam penghasilan komprehensif lain setelah memperhitungkan saldo selisih biaya perolehan dan nilai nominal yang belum diamortisasi dan saldo akumulasi keuntungan atau kerugian nilai wajar yang telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain sebelumnya. Ketika investasi sukuk dihentikan pengakuannya, akumulasi keuntungan atau kerugian yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi ke laba rugi.

- The investment is held in a business model whereby the primary goal is to obtain contractual cash flows and sell sukuk, has contractual terms in determining the specific date of principal payments and or the results.
- Sukuk acquisition cost includes transaction cost, and difference between the acquisition cost and the nominal value is amortized on a straight-line basis over the period of the sukuk and recognized to profit or loss.
- Gain or loss from changes of fair value is recognized in other comprehensive income after considering unamortized difference of acquisition cost and nominal value and accumulated gain or loss of fair value which has previously recognized in other comprehensive income. When sukuk is derecognized, accumulated gain or loss which has previously recognized in other comprehensive income is reclassified to profit or loss.

c. Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

c. Measured at fair value through profit or loss

Biaya perolehan sukuk tidak termasuk biaya transaksi, dan selisih antara nilai wajar dan jumlah tercatat diakui dalam laba rugi.

Sukuk acquisition cost excludes transaction cost and the difference between fair value and the carrying value is recognized in profit or loss.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

f. Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan

Pada setiap tanggal pelaporan, Bank menghitung kerugian kredit ekspektasian berdasarkan estimasi 12 bulan. Jika terjadi kenaikan risiko kredit yang signifikan sejak pengakuan awal maka estimasi kerugian kredit ekspektasian akan dihitung sepanjang umur kontrak.

Kerugian kredit ekspektasian merupakan estimasi probabilitas tertimbang dari kerugian kredit (yaitu nilai kini dari seluruh kekurangan kas) selama perkiraan umur instrumen keuangan. Kekurangan kas adalah selisih antara arus kas yang terutang kepada Bank sesuai dengan kontrak dan arus kas yang diperkirakan akan diterima oleh Bank.

Bank menetapkan definisi peningkatan risiko kredit instrumen keuangan secara signifikan sejak pengakuan awal sebagai berikut:

- Sesuai dengan praduga (*rebuttable presumption*) PSAK 71, yaitu ketika pembayaran kontraktual tertunggak lebih dari 30 hari; atau
- Ketika terjadi restrukturisasi aset keuangan yang disebabkan oleh peningkatan risiko kredit.

Bank menerapkan definisi gagal bayar (*stage 3*) yang konsisten dengan definisi yang digunakan untuk tujuan manajemen risiko kredit internal untuk instrumen keuangan yang relevan, yaitu:

- Ketika instrumen keuangan telah menunggak 90 hari; atau
- Telah berada pada kolektibilitas BI 3, 4, atau 5.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

f. Allowance for impairment losses on financial assets

At reporting date, the Bank calculates expected credit loss based on estimated 12 months. If there is a significant increase in credit risk since initial recognition, the estimated expected credit loss will be calculated throughout the life of the contract.

Expected credit losses are estimated weighted probabilities of credit losses (is the present value of all cash shortages) over the estimated life of the financial instrument. Cash shortages are the difference between the cash flows owed to the Bank in accordance with the contract and the cash flows that are expected to be received by the Bank.

The Bank has determined the definition of a significant increase in credit risk of financial instruments since initial recognition as follows:

- In accordance with presumption (*rebuttable presumption*) SFAS 71, i.e. when contractual payments are overdue for more than 30 days; or
- When there is a restructuring of financial assets caused by increased credit risk.

The Bank applies a definition of default (*stage 3*) that is consistent with the definition used for internal credit risk management for relevant financial instruments, namely:

- When financial instruments are in 90 days in arrears; or
- Is in BI collectibility 3, 4, or 5.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

f. Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)

Bank mengelompokkan aset keuangan dibeli dari aset keuangan memburuk apabila:

- Hilangnya pasar aktif dari aset keuangan; dan
- Pembelian dengan diskon sangat besar.

Bank mengelompokkan aset keuangan berasal dari aset keuangan memburuk apabila:

- Pihak peminjam dinyatakan pailit;
- Terdapat perubahan dari bentuk penyediaan dana, atau
- Debitur telah berada pada *stage 3* dan memenuhi salah satu kondisi berikut:
 - Telah dilakukan restrukturisasi secara berulang-ulang dan terjadi pelanggaran kontrak secara signifikan; atau
 - Atas restrukturisasi yang terjadi, terdapat selisih negatif lebih dari 20% atas nilai kini arus kas masa depan (yang didiskontokan menggunakan suku bunga efektif awal) antara persyaratan awal dan persyaratan restrukturisasi.

Bank melakukan penurunan nilai secara individu atau kolektif dengan mempertimbangkan semua informasi yang wajar dan didukung, termasuk informasi yang bersifat perkiraan masa depan (*forward-looking*).

Perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara kolektif, berdasarkan pada karakteristik risiko kredit yang sama dengan mempertimbangkan segmentasi kredit berdasarkan permodelan kerugian masa depan.

Bank menggunakan metode statistik, *credit rating* dan perkiraan makroekonomi untuk menilai cadangan kerugian penurunan nilai atas kredit yang diberikan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

f. Allowance for impairment losses on financial assets (continued)

The Bank classifies purchased or originated credit-impaired financial asset if:

- Loss of an active market from financial assets; and
- Purchases with very large discounts.

The Bank classifies financial assets derived from deteriorat financial assets if:

- The borrower is declared bankrupt;
- There is a change in the form of provision of funds, or
- The debtor is at stage 3 and meets one of the following conditions:
 - Repeated restructuring and significant breach of contract; or
 - For the restructuring that occurs, there is a negative difference of more than 20% of the present value of future cash flows (discounted using the initial effective interest rate) between the initial terms and the terms of the restructuring.

The Bank is impaired individually or collectively by considering all reasonable and supported information, including forward looking information.

Calculation of allowance for impairment losses on financial assets assessed collectively is grouped based on similar credit risk characteristics and taking into account the loan segmentation based on future loss model

The Bank uses statistical method, credit rating and macroeconomy forecast to assess allowance for impairment losses on loans.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

f. Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)

f.1. Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang murabahah

Bank dapat menetapkan debitur untuk dievaluasi secara individual apabila memenuhi minimal salah satu kriteria sebagai berikut:

Kredit Konsumer:

1. Akun yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Akun yang *default* (*bucket* 5) atau restrukturisasi; dan
 - b. Memiliki pokok di atas atau sama dengan Rp4 miliar
2. Mengalami bencana alam yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan ataupun instansi pemerintah dan disetujui Direksi.
3. Kualitas kredit kolektibilitas 5 di atas 5 (lima) tahun (minimal DPD 2006 hari) dengan kriteria tidak ada sertifikat atau belum dilakukan pengikatan sempurna (HT) kecuali kredit program (SKMHT)
4. Hasil lelang dibawah kewajiban pokok
5. Terkait permasalahan hukum dengan indikasi, antara lain:
 - a. Sengketa agunan; atau
 - b. Sengketa lahan.
 Dimana salah satu dari 2 (dua) sengketa tersebut sudah terbit ketetapan hukum mengikat dan menimbulkan kerugian bagi Bank.
6. Debitur minimal masuk *bucket* 4 dan terdapat minimal 2 (dua) permasalahan sebagai berikut:
 - a. Tempat bekerja debitur atau usaha debitur mengalami kebangkrutan
 - b. Debitur terkena PHK
 - c. Sertifikat belum terbit selama minimal 36 bulan sejak akad kredit
 - d. Rumah yang menjadi agunan tidak selesai atau terbengkalai
 - e. Pembayaran angsuran dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak terafiliasi oleh debitur
 - f. Debitur sudah mengalami restrukturisasi minimal 2 (dua) kali.
 - g. Debitur mengalami permasalahan hukum
 - h. Klaim asuransi terkait kredit ditolak/ tidak dibayar oleh asuradur.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

f. Allowance for impairment losses on financial assets (continued)

f.1. Loans and murabahah financing receivables

Bank may assign debtors to be evaluated individually if they meet at least one of the following criteria:

Consumer Credit:

1. Accounts that meet the following criteria:
 - a. Account that defaults (*bucket* 5) or restructured; and
 - b. Has a principal of more than or equal to Rp4 billion
2. Experienced a natural disaster as determined by the Financial Services Authority or government agency and approved by the Board of Directors.
3. Credit quality collectibility of 5 over 5 (five) years (minimum DPD 2006 days) with the criteria of no certificate or perfect binding (HT) except for program credit (SKMHT)
4. The auction proceeds under the principal obligation
5. In relation to legal issues with indications, among others:
 - a. Collateral dispute ; or
 - b. Land dispute.
 Where one of the 2 (two) disputes a binding legal provision has been issued and causes losses to the Bank.
6. Debtors are at least in bucket 4 and there are at least 2 (two) problems as follows:
 - a. The debtor's place of work or the debtor's business is bankrupt
 - b. The debtor is laid off
 - c. The certificate has not been issued for at least 36 months since the credit agreement
 - d. The house that became the collateral was not finished or was abandoned
 - e. Installment payments are made by a third party that is not affiliated with the debtor
 - f. The debtor has undergone restructuring at least 2 (two) times.
 - g. The debtor is experiencing legal problems
 - h. Insurance claims related to credit rejected/not paid by the insurer.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

f. Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)

f.1. Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang murabahah (lanjutan)

Kredit Komersial:

1. Akun yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Akun yang *default* (*bucket* 5) atau restrukturisasi; dan
 - b. Memiliki pokok di atas atau sama dengan Rp30 miliar
2. Mengalami bencana alam yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan ataupun instansi pemerintah dan disetujui Direksi.
3. Kualitas kredit kolektibilitas 5 di atas 5 (lima) tahun (minimal DPD 2006 hari) dengan kriteria tidak ada sertifikat atau belum dilakukan pengikatan sempurna (HT) kecuali kredit program (SKMHT)
4. Hasil lelang dibawah kewajiban pokok
5. Terkait pemasalahan hukum dengan indikasi, antara lain:
 - a. Sengketa pengurus,
 - b. Sengketa agunan,
 - c. Sengketa lahan,
 - d. Sengketa proyek,
 Dimana salah satu dari 4 (empat) sengketa tersebut sudah terbit ketetapan hukum mengikat dan menimbulkan kerugian bagi bank.
6. Dalam hal penetapan kolektibilitas menggunakan konsep 3 (tiga) pilar maka kriteria *individual assessment* dapat ditetapkan dengan kriteria: minimal masuk *bucket* 4 (hari tunggakan 61 hari) dan terdapat minimal 2 (dua) dari 3 (tiga) permasalahan sebagai berikut:
 - a. Permasalahan prospek usaha menurun dengan indikasi antara lain:
 - i. Tidak terdapat pembayaran pokok sesuai dengan ketentuan dan atau kesepakatan yang telah dibuat, atau
 - ii. Pembangunan berhenti lebih dari 1 (satu) tahun, dan/atau
 - iii. Tidak terdapat penjualan lebih dari 1 (satu) tahun.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

f. Allowance for impairment losses on financial assets (continued)

f.1. Loans and murabahah financing receivables (continued)

Commercial Credit:

1. Accounts that meet the following criteria:
 - a. Account that defaults (*bucket* 5) or restructured; and
 - b. Has a principal of more than or equal to Rp30 billion
2. Experienced a natural disaster as determined by the Financial Services Authority or government agency and approved by the Board of Directors.
3. Credit quality collectibility of 5 over 5 (five) years (minimum DPD 2006 days) with the criteria of no certificate or perfect binding (HT) except for program credit (SKMHT)
4. The auction proceeds under the principal obligation
5. In relation to legal issues with indications, among others:
 - a. Collateral dispute ; or
 - b. Collateral dispute,
 - c. Land dispute,
 - d. Project dispute
 Where one of the 4 (four) disputes has issued a binding legal provision and/or causes losses to the bank.
6. In the case of collectability using the 3 (three) pillar concept, the individual assessment criteria can be determined with the following criteria: at least entering *bucket* 4 (days arrears 61 days) and there are at least 2 (two) out of 3 (three) problems as follows:
 - a. Problems with decreased business prospects with indications include:
 - i. There is no principal payment in accordance with the provisions and/or agreements that have been made, or
 - ii. Construction has stopped for more than 1 (one) year, and/ or
 - iii. There are no sales for more than 1 (one) year

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

f. Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)

f.1. Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang murabahah (lanjutan)

Kredit Komersial: (lanjutan)

- b. Permasalahan agunan dengan memenuhi salah satu indikasi/ kriteria sebagai berikut:
 - i. Sertifikat agunan belum atas nama debitur atau pengurus yang tidak dapat diikat Hak Tanggungan;
 - ii. Sertifikat agunan belum dilakukan pengikatan Hak Tanggungan 12 bulan sejak akad kredit dan status *default*;
 - iii. Sertifikat tidak memiliki alas hukum untuk dilakukan pengalihan kepada pembeli;
 - iv. Agunan belum terbit sertifikat;
 - v. Agunan tidak terbangun 100% khusus kredit investasi;
- c. Permasalahan kemampuan membayar mengalami penurunan

Perhitungan komponen PD, LGD, dan EAD yang dilakukan secara kolektif pada setiap segmentasi kredit mempertimbangkan data historis, saat ini dan masa yang akan datang.

Perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara kolektif berdasarkan karakteristik risiko kredit yang sama dengan mempertimbangkan segmentasi kredit berdasarkan pengalaman kerugian masa lalu dan kemungkinan terjadinya kegagalan (*probability of default*). Aset keuangan dikelompokkan berdasarkan karakteristik risiko kredit yang sama antara lain dengan mempertimbangkan segmentasi kredit dan tunggakan debitur.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

f. Allowance for impairment losses on financial assets (continued)

f.1. Loans and murabahah financing receivables (continued)

Commercial Credit: (continued)

- b. Collateral problems by meeting one of the following indications/criteria:
 - i. The collateral certificate is not yet in the name of the debtor or management that cannot be bound by the Mortgage;
 - ii. Collateral certificate has not been bound by the Mortgage Rights 12 months since the credit agreement and default status;
 - iii. The certificate has no legal basis for transfer to the buyer;
 - iv. The collateral has not been issued a certificate;
 - v. Collateral is not built 100% specifically for investment credit;
- c. The problem of ability to pay has decreased

The computation of PD, LGD, and EAD components carried out collectively in each credit segmentation takes into account historical, current and future data.

Calculation of allowance for impairment losses on financial assets assessed collectively grouped based on similar credit risk characteristics and taking into account the loan segmentation based on historical loss experience and the possibility of failure (*probability of default*). Financial assets are grouped on the basis of similar credit risk characteristics by considering the credit segmentation and past due status of the debtors, among others.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

f. Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)

f.1. Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang murabahah (lanjutan)

Bank perlu mempertimbangkan informasi masa lalu, masa sekarang dan masa depan dalam menghitung kemungkinan kejadian gagal bayar. Oleh karena itu, perhitungan PD dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- Perhitungan PD secara historis (PD TTC)
- Perhitungan PD *forward-looking*; dan
- Perhitungan PD *Point in time* (PiT) melalui proses *scaling*

LGD merupakan estimasi kerugian atas debitur dengan menghitung *recovery* yang didapatkan setelah debitur tersebut *default*. LGD diperhitungkan sebesar 100% dikurangi tingkat pengembalian (*recovery rate*), perhitungan LGD dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- Perhitungan LGD secara historis (LGD TTC);
- Perhitungan LGD *Point in Time* (LGD PiT) dengan mempertimbangkan informasi *forward looking*.

Dalam membuat estimasi *recoverable amount* (estimasi jumlah yang dapat diperoleh kembali), Bank dapat menggunakan metode berikut ini:

- Discounted Cash Flow**
Bank melakukan perhitungan berdasarkan jumlah yang telah didiskonto (*discounted value*) dari estimasi arus kas masa datang (pokok dan bunga) yang didiskonto berdasarkan Suku Bunga Efektif dari setiap kredit.
- Expected Collateral**
Bank melakukan perhitungan berdasarkan estimasi penjualan agunan yang dilakukan dengan mempertimbangkan nilai wajar dan jangka waktu estimasi penjualan agunan di masa depan. Hasil perhitungan akan didiskontokan berdasarkan Suku Bunga Efektif dari setiap kredit.
- Metode lainnya yang berdasarkan analisis Bank lebih sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan Regulator.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

f. Allowance for impairment losses on financial assets (continued)

f.1. Loans and murabahah financing receivables (continued)

Bank needs to consider past, present and future information in calculating the probability of default. Therefore, the calculation of PD is carried out in the following stages:

- Historical PD calculation (PD TTC)
- forward-looking PD calculation; and
- Calculation of PD *Point in time* (PiT) through a scaling process

LGD is an estimated loss for a debtor by calculating the recovery obtained after the debtor defaults. LGD is calculated as 100% minus the rate of return (*recovery rate*), LGD calculation is carried out in the following stages:

- Historical LGD calculation (LGD TTC);
- Calculation of LGD *Point in Time* (LGD PiT) by considering forward looking information.

The Bank uses the fair value of collateral as the basis for future cash flow if one of the following conditions is met:

- Discounted Cash Flow**
The Bank performs calculations based on the discounted amount (*discounted value*) of future cash flows (*principal and interest*) discounted based on the Effective Interest Rate of each loan.
- Expected Collateral**
The Bank calculates earthquakes which are calculated based on the analysis carried out by considering the fair value and the estimated future sales period. The calculation results will be discounted based on the Effective Interest Rate of each loan.
- Other methods based on the Bank's analysis are more appropriate and do not conflict with the Regulators' provisions.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

f. Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan (lanjutan)

f.1. Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang murabahah (lanjutan)

Sesuai dengan PSAK No. 102, "Akuntansi Murabahah" dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) Revisi 2013), Bank menghitung CKPN untuk piutang murabahah sesuai dengan ketentuan di ISAK No. 102, "Penurunan Nilai Piutang Murabahah".

f.2. Pembiayaan/piutang syariah selain murabahah

Untuk aset keuangan berupa piutang *istishna*, pinjaman *qardh*, pembiayaan *mudharabah*, dan pembiayaan *musyarakah*, Bank menerapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.02/POJK.03/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang "Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah".

Cadangan kerugian minimum yang harus dibentuk sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. 1% dari aset produktif yang digolongkan Lancar, di luar penempatan pada Bank Indonesia, obligasi pemerintah, instrumen hutang lain yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan aktiva produktif yang dijamin dengan agunan tunai;
- b. 5% dari aset produktif yang digolongkan Dalam Perhatian Khusus setelah dikurangi agunan;
- c. 15% dari aset produktif yang digolongkan Kurang Lancar setelah dikurangi agunan;
- d. 50% dari aset produktif yang digolongkan Diragukan setelah dikurangi agunan; dan
- e. 100% dari aset produktif yang digolongkan Macet setelah dikurangi agunan.

Kriteria penilaian nilai agunan yang dapat dikurangkan dalam pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (OJK).

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

f. Allowance for impairment losses on financial assets (continued)

f.1. Loans and murabahah financing receivables (continued)

In accordance with SFAS No. 102, "Accounting for Murabahah" and Indonesia Sharia Banking Accounting Guidelines (PAPSI Revised 2013), the Bank calculates individual allowance for impairment losses for murabahah receivable in accordance with IFAS No. 102 "Impairment of Murabahah Receivables".

f.2. Sharia financing/receivables other than murabahah

For financial assets of *istishna* receivables, funds of *qardh*, *mudharabah* financing, and *musyarakah* financing, the Bank implements POJK No.02/POJK.03/2022 dated January 31, 2022 regarding "Asset Quality Ratings for Sharia Bank and Sharia Business Unit".

The minimum allowance to be provided in accordance with Bank Indonesia Regulation is as follows:

- a. 1% of earning assets classified as Current, excluding placements with Bank Indonesia, government bonds, other debt instruments issued by the Government of the Republic of Indonesia and earning assets secured by cash collateral;
- b. 5% of earning assets classified as Special Mention, net of deductible collateral;
- c. 15% of earning assets classified as Sub-standard, net of deductible collateral;
- d. 50% of earning assets classified as Doubtful, net of deductible collateral; and
- e. 100% of earning assets classified as Loss, net of deductible collateral.

The criterias for assessment of the value of collateral that can be deducted in the calculation of allowance for impairment losses are based on Bank Indonesia Regulations (OJK).

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

g. Giro pada Bank Indonesia dan bank lain

**g. Current accounts with Bank Indonesia and
other banks**

Giro pada Bank Indonesia dan bank lain dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai. Giro pada Bank Indonesia dan Bank lain diklasifikasikan sebagai biaya perolehan diamortisasi.

Current accounts with Bank Indonesia and other banks are stated at amortized cost using the effective interest method less allowance for impairment losses. Current accounts with Bank Indonesia and other banks are classified as amortized cost.

h. Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain

**h. Placements with Bank Indonesia and other
banks**

Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain merupakan penanaman dana pada Bank Indonesia berupa *deposit facility*, *term deposit* dan *deposit facility* syariah, sedangkan penempatan pada bank lain berupa deposito berjangka, *interbank call money* dan tabungan.

Placements with Bank Indonesia and other banks represent placements of funds in Bank Indonesia in the form of deposit facility, term deposit and sharia deposit facility, whereas placement with other banks is in the form of time deposit, interbank call money and savings.

Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai. Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain diklasifikasikan sebagai biaya perolehan diamortisasi.

Placements with Bank Indonesia and other banks are stated at amortized cost using the effective interest method less allowance for impairment losses. Placements with Bank Indonesia and other banks are classified as amortized cost.

i. Efek-efek dan obligasi pemerintah

i. Securities and government bonds

Efek-efek terdiri dari surat berharga yang diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang, antara lain Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Sertifikat Deposito Bank Indonesia (SDBI), obligasi, *Negotiable Certificate of Deposit* (NCD), *Medium Term Notes* (MTN), penyertaan reksadana dan Efek Beragun Aset (EBA).

Securities consist of securities traded in the capital market and money market, such as Bank Indonesia Certificates (SBI), Deposits Certificates of Bank Indonesia (SDBI), bonds, *Negotiable Certificate of Deposit* (NCD), *Medium Term Notes* (MTN) mutual funds and Asset Backed Securities (ABSs).

EBA adalah portofolio efek yang terdiri dari aset keuangan berupa kumpulan tagihan kredit kepemilikan rumah. EBA terbentuk ketika bank menjual pinjaman atau utang lainnya kepada penerbit (lembaga keuangan) lalu disusun dalam suatu portofolio untuk dijual kembali kepada investor.

ABSs are securities portfolio consisting of financial assets in the form of mortgages loan. ABSs are created when bank sells its loans or other debts to an issuer (financial institution) and then arranged in a portfolio in order to resale to investors.

Obligasi Pemerintah adalah obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia.

Government bonds are bonds issued by the Indonesian Government.

Pengukuran efek-efek dan obligasi Pemerintah didasarkan atas klasifikasinya sebagai berikut:

The measurement of securities and Government bonds are based on the classification of the securities as follows:

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

i. Efek-efek dan obligasi pemerintah (lanjutan)

Pengukuran efek-efek dan obligasi Pemerintah didasarkan atas klasifikasinya sebagai berikut: (lanjutan)

1. Efek-efek dan obligasi pemerintah yang diklasifikasikan sebagai biaya perolehan yang diamortisasi diukur dengan biaya perolehan yang diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif. Pendapatan bunga diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain menggunakan metode suku bunga efektif.
2. Efek-efek dan obligasi pemerintah yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL) diukur dengan menggunakan nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajarnya disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Perubahan nilai wajar diakui pada laporan laba rugi. Atas penjualan portofolio efek-efek dan obligasi pemerintah untuk nilai wajar melalui laba rugi, perbedaan antara harga jual dengan nilai pasar wajar diakui sebagai keuntungan atau kerugian penjualan pada tahun dimana efek-efek dan obligasi pemerintah tersebut dijual.
3. Efek-efek dan obligasi pemerintah yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (FVTOCI) diukur dengan menggunakan nilai wajar. Pendapatan bunga diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain menggunakan metode suku bunga efektif. Perubahan nilai wajar lainnya diakui langsung dalam ekuitas sampai efek-efek dan obligasi pemerintah dijual atau mengalami penurunan nilai, dimana akumulasi keuntungan dan kerugian yang sebelumnya diakui dalam ekuitas diakui dalam laporan laba rugi penghasilan komprehensif lain.

j. Kredit yang diberikan

Kredit yang diberikan merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan kesepakatan dengan pihak penerima kredit dan mewajibkan pihak penerima kredit untuk melunasi setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bunga.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

i. Securities and government bonds (continued)

The measurement of securities and Government bonds are based on the classification of the securities as follows: (continued)

1. Securities and government bonds classified as amortized cost are measured at amortized cost using the effective interest method. Interest income is recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income using the effective interest method.
2. Securities and government bonds classified as fair value through profit or loss (FVTPL) are measured using fair value. Unrealized gains or losses resulting from changes in fair values are recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income. Changes in fair value are recognized in profit or loss. Upon sale of portfolio of fair value through profit or loss securities and government bonds, the difference between the selling price and the fair value is recognized as a gain or loss in the year when the securities and government bonds are sold.
3. Securities and government bonds classified as fair value through other comprehensive income (FVTOCI) are measured using fair value. Interest income is recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income using the effective interest method. Other fair value changes are recognized directly in equity until the securities and Government bonds are sold or impaired, whereby the cumulative gains and losses previously recognized in the equity are recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

j. Loans

Loans represent the lending of money or equivalent receivables under contracts with borrowers, where the borrowers are required to repay their debts with interest after a specified period of time.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

j. Kredit yang diberikan (lanjutan)

Kredit yang diberikan (termasuk kredit yang diberikan dalam pinjaman sindikasi) pada awalnya diukur pada nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan biaya tambahan untuk memperoleh aset keuangan tersebut. Setelah pengakuan awal kredit yang diberikan diukur pada biaya perolehan amortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

Kredit yang diberikan diklasifikasikan sebagai diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Kredit yang diberikan dalam pinjaman sindikasi ataupun penerusan kredit dinyatakan sebesar pokok kredit sesuai dengan porsi risiko yang ditanggung oleh Bank.

Restrukturisasi kredit

Restrukturisasi kredit meliputi adanya perpanjangan jangka waktu pembayaran dan ketentuan kredit yang baru.

Kredit yang direstrukturisasi disajikan sebesar nilai yang lebih rendah antara nilai tercatat kredit pada tanggal restrukturisasi atau nilai tunai penerimaan kas masa depan setelah restrukturisasi. Kerugian akibat selisih antara nilai tercatat kredit pada tanggal restrukturisasi dengan nilai tunai penerimaan kas masa depan setelah restrukturisasi diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Setelah restrukturisasi, semua penerimaan kas masa depan yang ditetapkan dalam persyaratan baru dicatat sebagai pengembalian pokok kredit yang diberikan dan pendapatan bunga sesuai dengan syarat-syarat restrukturisasi.

Penjualan Kredit Pemilikan Rumah (KPR)

Bank telah melakukan penjualan atas KPR kepada pihak ketiga.

Atas penjualan tersebut, Bank telah memindahkan risiko dan manfaat atas kepemilikan KPR kepada pihak lawan. Oleh karena itu, pada tanggal efektif penjualan, Bank menghentikan pengakuan atas KPR tersebut.

Penjualan tersebut telah memenuhi kriteria jual putus seperti yang tertuang dalam Peraturan OJK No.11/POJK.03/2019.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

j. Loans (continued)

Loans (including loans under syndication) are initially measured at fair value plus transaction costs that are directly attributable to obtaining the financial asset. After initial recognition, loans are measured at amortized cost using the effective interest method, net of allowance for impairment losses.

Loans are classified as amortized costs.

Loans under syndication or channelling are stated at the principal amount equal to the risk portion assumed by the Bank.

Loan restructuring

Loan restructuring may involve extending the payment arrangements and new loan conditions.

Restructured loans are stated at the lower of carrying value on the date of restructuring or value of the future cash receipts after the restructuring. Losses resulting from the difference between the carrying value on the date of restructuring the present value of future cash receipts after the restructuring is recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income. After the restructuring, all future cash receipts specified by the new terms are recorded as a return of principal loans and interest income in accordance with the terms of the restructuring.

Sales of Housing Loans (KPR)

The Bank sold its KPR to third parties.

In relation with the above mention sale, the Bank has transferred the risk and rewards of ownership of the KPR to counterparty. Hence, at the effective date of the sale, the Bank derecognized the KPR.

The sale has fulfill the criteria of true sale according to OJK regulation No. 11/POJK.03/2019.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

k. Pembiayaan/piutang syariah

k. Sharia financing/receivables

Pembiayaan/piutang syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, yang timbul dari transaksi berdasarkan prinsip jual beli dan bagi hasil antara Bank dengan pihak lain selama jangka waktu tertentu. Piutang tersebut meliputi piutang *murabahah*, piutang *istishna* dan *qardh*, untuk pembiayaan meliputi pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*.

Financing/receivables based on Sharia principles is receivables from providing funds or other similar form of receivables arising from transactions carried out based on sale or purchase arrangements and profit sharing between Bank and other parties for a certain period of time. Such receivables consist of receivables arising from *murabahah* transactions, *istishna* transactions and *qardh* transactions, for financing consist of *mudharabah* and *musyarakah* financing.

Murabahah adalah akad jual beli antara nasabah dengan Bank, dimana Bank membiayai kebutuhan konsumsi, investasi dan modal kerja nasabah yang dijual dengan harga pokok ditambah dengan keuntungan yang diketahui dan disepakati bersama. Pembayaran atas pembiayaan ini dilakukan dengan cara mengangsur dalam jangka waktu yang ditentukan.

Murabahah is a sale and purchase contract between the customer and Bank, whereby Bank finances the consumption, investment and working capital needs of the customer sold with a principle price plus a certain margin that is mutually informed and agreed. Repayment on this financing is made in installments within a specified period.

Piutang *murabahah* pada awalnya diukur pada nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan merupakan biaya tambahan untuk memperoleh aset keuangan tersebut dan setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode marjin efektif dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

Murabahah receivables are initially measured at fair value plus direct attributable transaction costs and is an additional cost to obtain the respected financial assets and after the initial recognition are measured at amortized cost using the effective margin method less any allowance for impairment losses value.

Mudharabah merupakan pembiayaan kerjasama antara Bank sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dengan nasabah sebagai pelaksana usaha (*mudharib*) selama jangka waktu tertentu. Pembagian hasil keuntungan dari proyek atau usaha tersebut ditentukan sesuai dengan *nisbah* (*pre-determined ratio*) yang telah disepakati bersama. Pada tanggal laporan posisi keuangan, pembiayaan *mudharabah* dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurangi dengan saldo cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk berdasarkan hasil revidu oleh manajemen terhadap kualitas pembiayaan yang ada.

Mudharabah financing is a joint financing made between Bank as the owner of the funds (*shahibul maal*) and the customer as a business executor (*mudharib*) during a certain period. The profit sharing from the project or the business is determined in accordance with the mutually agreed *nisbah* (*pre-determined ratio*). On the statement of financial position date, *mudharabah* financing is stated at the outstanding financing balance less allowance for impairment losses which is provided based on the management's review of the financing quality.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

k. Pembiayaan/piutang syariah (lanjutan)

k. Sharia financing/receivables (continued)

Musarakah adalah akad kerjasama yang terjadi diantara para pemilik modal (mitra musarakah) untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan dengan *nisbah* pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal. Pada tanggal laporan posisi keuangan, pembiayaan *musarakah* dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurangi dengan saldo cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk berdasarkan hasil revidi oleh manajemen terhadap kualitas pembiayaan yang ada.

Musarakah is a partnership contract among fund's owners (*musarakah partners*) to contribute funds and conduct a business on a joint basis through partnership with the profit sharing based on a predetermined ratio, while the losses are borne proportionally based on the capital contribution. On the statement of financial position date, *musarakah* financing is stated at the outstanding financing balance less allowance for impairment losses which is provided based on the management's review on the financing quality.

Istishna adalah akad penjualan antara *al-mustashni* (pembeli) dan *al-shani* (produsen yang juga bertindak sebagai penjual). Berdasarkan akad tersebut, pembeli menugasi produsen untuk membuat atau mengadakan *al-mashnu* (barang pesanan) sesuai spesifikasi yang diisyaratkan pembeli dan menjualnya dengan harga yang disepakati. Piutang *istishna* disajikan sebesar tagihan termin kepada pembeli akhir dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

Istishna is a sale and purchase contract between *al-mustashni* (buyer) and *al-shani* (manufacturer also acting as the seller). Based on the contract, the buyer orders the manufacturer to produce or to supply *al-mashnu* (goods ordered) according to the specifications required by the buyer and to sell them at agreed price. *Istishna* receivables are stated at outstanding billings to final buyer less allowance for impairment losses.

Qardh adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang meminjamkan yang mewajibkan peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu. Pinjaman *qardh* dinyatakan sebesar saldo pinjaman dikurangi dengan saldo cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk berdasarkan hasil revidi oleh manajemen terhadap kualitas pinjaman yang ada.

Qardh is the provision of funds or equivalent claims based on agreement between the borrower and the lender that requires the borrower to repay the debts after a certain period of time. *Qardh* are stated at outstanding balance less allowance for impairment losses based on the management's review on the financing quality.

l. Tagihan dan liabilitas akseptasi

l. Acceptances receivable and payable

Tagihan dan liabilitas akseptasi merupakan transaksi Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) yang diaksep oleh bank pengaksep (*accepting bank*).

Acceptances receivable and payable represent Letters of Credit by Local Document (SKBDN) transactions that have been accepted by the accepting bank.

Tagihan dan liabilitas akseptasi dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi. Tagihan akseptasi disajikan setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

Acceptances receivable and payable are stated at amortized cost. Acceptances receivable are stated net of allowance for impairment losses.

Tagihan dan liabilitas akseptasi diklasifikasikan sebagai diukur pada biaya perolehan amortisasi.

Acceptances receivable and payable are classified as amortized costs.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

m. Penyertaan Saham

m. Investment in shares

Penyertaan saham merupakan investasi jangka panjang pada perusahaan non-publik serta penyertaan modal sementara pada perusahaan debitur yang timbul akibat konversi kredit yang diberikan atau jenis transaksi tertentu yang berakibat Bank memiliki saham pada perusahaan debitur.

Investments in shares represent long-term investments in non-publicly-listed companies and temporary investments in debtor companies arising from conversion of loans or certain of transactions which resulted The Bank have shares in debtor's company.

Penyertaan saham dengan persentase kepemilikan 20,00% sampai dengan 50,00% dicatat dengan metode ekuitas. Dalam metode ini, penyertaan dicatat sebesar biaya perolehan disesuaikan dengan bagian Bank atas ekuitas perusahaan asosiasi dan dikurangi dengan penerimaan dividen sejak tanggal perolehan, dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

Investments in shares represent ownership interests of 20.00% to 50.00% are recorded using the equity method. Under this method, investments are recorded at cost and adjusted for the Bank's proportionate share in the net equity of the investees and reduced by dividends earned starting the acquisition date net of by allowance for impairment losses

Penyertaan modal sementara dihapusbuku dari laporan posisi keuangan apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan Peraturan OJK No. 40/POJK.03/2019 tentang "Penilaian Kualitas Aset Bank Umum".

Temporary investment is written-off from the statement of financial position if it is held for more than 5 (five) years in accordance with OJK Regulation No. 40/POJK.03/2019 regarding "Asset Quality Rating for Commercial Banks".

n. Aset tetap

n. Premises and equipment

Aset tetap awalnya diakui sebesar biaya perolehan, yang terdiri atas harga perolehan dan biaya-biaya tambahan yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan supaya aset tersebut siap digunakan sesuai dengan maksud manajemen.

All premises and equipment are initially recognized at cost, which comprises its purchase price and any costs directly attributable in bringing the asset to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management.

Setelah pengakuan awal, aset tetap selain tanah dinyatakan pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai.

Subsequent to initial recognition, premises and equipment besides lands are carried at cost less any subsequent accumulated depreciation and impairment losses.

Aset tetap yang diperoleh dalam pertukaran aset non-moneter atau kombinasi aset moneter dan non-moneter diukur pada nilai wajar, kecuali:

Premises and equipment acquired in exchange for a non-monetary asset or for a combination of monetary and non-monetary assets are measured at fair values, unless:

- (i) Transaksi pertukaran tidak memiliki substansi komersial, atau
- (ii) Nilai wajar dari aset yang diterima dan diserahkan tidak dapat diukur secara andal.

- (i) *The exchange transaction lacks commercial substance, or*
- (ii) *The fair value of neither the assets received nor the assets given up can be measured reliably.*

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

n. Aset tetap (lanjutan)

n. Premises and equipment (continued)

Penyusutan bangunan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus (*straight-line method*) sedangkan peralatan kantor dan kendaraan bermotor dihitung dengan menggunakan metode saldo menurun ganda (*double-declining balance method*) berdasarkan taksiran masa manfaat aset tetap sebagai berikut:

Depreciation of buildings is computed using the straight-line method while depreciation of office furniture and fixtures, and motor vehicles is computed using the double-declining balance method, based on the estimated useful lives of the assets as follows:

	Tahun/Years
Bangunan	10 - 20
Peralatan kantor dan kendaraan bermotor	4 - 8

Buildings
Office furniture and fixtures and motor vehicles

Penilaian aset tetap dilakukan atas penurunan dan kemungkinan penurunan nilai wajar aset jika terjadi peristiwa atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat mungkin tidak dapat seluruhnya terealisasi.

The carrying amounts of premises and equipment are reviewed for impairment when events or changes in circumstances indicate that the carrying values may not be fully recoverable.

Pada setiap akhir tahun buku, manajemen melakukan pengkajian ulang atas nilai residu, masa manfaat dan metode penyusutan dan disesuaikan secara prospektif, jika diperlukan.

The residual values, useful lives and methods of depreciation of premises and equipment are reviewed by the management and adjusted prospectively, if appropriate, at the end of each year, if necessary.

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset) diperhitungkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pada periode aset tersebut dihentikan pengakuannya.

An item of premises and equipment is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising on derecognition of the asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset) is included in the statement of profit or loss and other comprehensive income in the period such asset is derecognized.

Tanah awalnya dinyatakan sebesar biaya perolehan dan tidak disusutkan. Setelah pengakuan awal, tanah diukur pada nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi rugi penurunan nilai setelah tanggal revaluasi. Penilaian terhadap tanah dilakukan oleh penilai yang memiliki kualifikasi profesional, dan dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa jumlah tercatat tanah tidak berbeda secara material dengan jumlah yang ditentukan dengan menggunakan nilai wajarnya pada akhir periode pelaporan (Catatan 14).

Land are initially recognized at cost and not depreciated. Subsequent to initial recognition, land is measured at fair value at the revaluation date less any subsequent accumulated impairment losses. Valuation of land are performed by appraisers with professional qualification and is done in regular basis to ensure that the carrying amount does not differ materially from its fair value at the end of reporting period (Note 14).

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

n. Aset tetap (lanjutan)

n. Premises and equipment (continued)

Kenaikan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi dicatat sebagai "Surplus Revaluasi Aset Tetap", dan disajikan dalam penghasilan komprehensif lain. Namun, kenaikan tersebut diakui dalam laba rugi hingga sebesar jumlah penurunan nilai aset yang sama akibat revaluasi yang pernah dilakukan sebelumnya dalam laba rugi. Penurunan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi diakui dalam laba rugi.

Increase in the carrying amount arising from revaluation is recorded in "Premises and equipment Revaluation Surplus" and presented in other comprehensive income. However, the increase is recognized in profit or loss, up to the amount of impairment of the same assets due to revaluation previously recognized in profit or loss. A decrease in carrying value arising as a result of a revaluation should be recognized in profit or loss.

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada operasi pada saat terjadinya. Beban pemugaran dan penambahan bahan dalam jumlah besar dikapitalisasi kepada jumlah tercatat aset tetap terkait bila besar kemungkinan bagi kelompok usaha manfaat ekonomi masa depan menjadi lebih besar dari standar kinerja awal yang ditetapkan sebelumnya dan disusutkan sepanjang sisa masa manfaat aset tetap terkait.

Repairs and maintenance is charged to the profit or loss as incurred. The cost of major renovation and restoration is capitalized to the carrying amount of the related premises and equipment when it is probable that future economic benefits in excess of the originally assessed standard of performance of the existing asset and is depreciated over the remaining useful life of the related asset.

Aset tetap dalam penyelesaian dicatat sebesar biaya perolehan, yang mencakup kapitalisasi beban pinjaman dan biaya-biaya lainnya yang terjadi sehubungan dengan pendanaan aset tetap dalam penyelesaian tersebut. Akumulasi biaya perolehan akan direklasifikasi ke akun "Aset Tetap" yang bersangkutan pada saat aset tetap tersebut telah selesai dikerjakan dan siap untuk digunakan. Aset tetap dalam penyelesaian tidak disusutkan karena belum tersedia untuk digunakan.

Construction in-progress are stated at cost, including capitalized borrowing costs and other charges incurred in connection with the financing of the said asset constructions. The accumulated costs will be reclassified to the appropriate "Premises and Equipment" account when the construction is completed and available for intended use. Assets under construction are not depreciated as these are not yet available for use.

Biaya pengurusan legal hak atas tanah dalam bentuk Hak Guna Usaha ("HGU"), Hak Guna Bangunan ("HGB") dan Hak Pakai ("HP") ketika tanah diperoleh pertama kali diakui sebagai bagian dari biaya perolehan tanah pada akun "Aset Tetap". Biaya pengurusan perpanjangan atau pembaruan legal hak atas tanah diakui sebagai aset tidak berwujud dan diamortisasi sepanjang umur hak hukum atau umur ekonomi tanah, mana yang lebih pendek.

The legal cost of land rights in the form of Business Usage Rights ("Hak Guna Usaha" or "HGU"), Building Usage Right ("Hak Guna Bangunan" or "HGB") and Usage Rights ("Hak Pakai" or "HP") when the land was initially acquired are recognized as part of the cost of the land under the "Premises and Equipment". The extension or the legal renewal costs of land rights were recognized as intangible assets and were amortized over the shorter of the rights' legal life and land's economic life.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

n. Aset tetap (lanjutan)

n. Premises and equipment (continued)

Jika nilai wajar dari aset yang direvaluasi mengalami perubahan yang signifikan dan fluktuatif, maka perlu direvaluasi secara tahunan, sedangkan jika nilai wajar dari aset yang direvaluasi tidak mengalami perubahan yang signifikan dan fluktuatif, maka perlu dilakukan revaluasi paling kurang 3 (tiga) tahun sekali.

If the fair value of the revalued asset change significantly, it is necessary to revalue on an annual basis, whereas if the fair value of the revalued asset does not change significantly, it is necessary to revalue at a minimum every 3 (three) years.

o. Aset hak guna dan liabilitas sewa

o. Right-of use assets and lease liabilities

PSAK No. 73 menerapkan persyaratan baru atau amandemen sehubungan dengan akuntansi sewa. Standar ini memperkenalkan perubahan signifikan untuk akuntansi lessee dengan menghapus perbedaan antara sewa operasi dan pembiayaan dan pengakuan aset hak guna dan liabilitas sewa, kecuali untuk sewa jangka pendek dan aset dengan nilai rendah. Berbeda dengan akuntansi lessee, persyaratan untuk akuntansi lessor sebagian besar tidak berubah. Dalam hal ini, Bank terekspos risiko Bank sebagai lessee.

SFAS No. 73 introduces new or amended requirements with respect to lease accounting. It introduces significant changes to lessee accounting by removing the distinction between operating and finance lease and requiring the recognition of a right-of-use asset and a lease liability at commencement for all leases, except for short-term leases and leases of low value assets. In contrast to lessee accounting, the requirements for lessor accounting have remained largely unchanged. In this case, Bank is exposed the risk of the Bank as lessee.

a) Dampak definisi baru dari sewa

a) Impact of the new definition of a lease

Perubahan utama dari definisi sewa berkaitan dengan konsep pengendalian. PSAK No. 73 menentukan apakah kontrak merupakan, atau mengandung sewa atas dasar jika penyewa memiliki hak untuk mengendalikan penggunaan aset selama suatu jangka waktu tertentu untuk dipertukarkan dengan imbalan. Hal tersebut merupakan perbedaan penentuan kontrak merupakan, atau mengandung sewa berdasarkan PSAK No. 30 yaitu dengan konsep risiko dan manfaat.

The change in the definition of a lease mainly relates to the concept of control. SFAS No. 73 determines whether a contract is, or contains, a lease if the lessee has the right to control the use of an identified asset for a certain period of time in exchange for consideration. This is in contrast to the focus on 'risks and rewards' in SFAS No. 30.

Bank menerapkan definisi sewa dan panduan terkait yang diterapkan dalam PSAK No. 73 untuk semua kontrak yang dicatat atau diubah pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020.

The Bank applies the definition of a lease and related guidance set out in SFAS No. 73 to all contracts entered into or changed on or after January 1, 2020.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

o. Aset hak guna dan liabilitas sewa (lanjutan)

o. Right-of use assets and lease liabilities (continued)

- b) Panduan praktis, pengecualian pengakuan dan pilihan kebijakan pada saat masa transisi, Bank memilih untuk menerapkan panduan praktis yang terdapat pada panduan transisi dalam PSAK No. 73, yang antara lain:
1. Penggunaan tingkat diskonto tunggal untuk portofolio sewa dengan karakteristik yang hampir sama;
 2. Tidak menerapkan pengakuan dan pengukuran berdasarkan PSAK 73 untuk kontrak dengan masa sewa kurang dari 12 bulan pada tanggal 1 Januari 2020 dan dicatat sebagai sewa jangka pendek; dan
 3. Pengecualian biaya langsung awal dari pengukuran aset hak guna pada tanggal penerapan awal.

- b) Practical expedient, recognition exemption and accounting policy option at the transition date, Bank decided to use the practical expedient that is permitted in SFAS No. 73, as:

1. Using a single discount rate to a portfolio of leases with reasonably similar characteristics;
2. Not to apply the recognition and measurement according to SFAS No. 73 of the contracts which lease term ends within 12 months of January 1, 2021 and recorded as short term lease; and
3. Exclude initial direct cost from the measurement of the right of use assets at the date of initial application.

Bank memilih pengecualian pengakuan untuk tidak menerapkan pengakuan dan pengukuran berdasarkan PSAK No. 73 untuk kontrak:

Bank may choose the recognition exemption not to recognize and measure according to SFAS No. 73 of the contract:

1. Sewa jangka pendek dengan masa sewa 12 bulan atau kurang; dan
2. Sewa dengan aset pendasar bernilai rendah.

1. Short term leases for which lease term is or below 12 months; and
2. Lease for which the underlying asset is low value.

Bank mengakui pembayaran sewa jangka pendek dan aset bernilai rendah sebagai beban baik dengan dasar garis lurus maupun dasar sistematis lainnya yang merepresentasikan pola manfaat.

Bank recognise the lease payment of short term and low value leases as an expense on either a straight line basis over the lease term or another systematic basis which represent the pattern of the benefit.

Selain itu, Bank juga memilih pilihan kebijakan untuk:

Besides, Bank may choose the policy option:

1. Tidak memisahkan komponen nonsewa dari komponen sewa, dan memilih mencatat masing-masing komponen sewa dan komponen nonsewa terkait sebagai komponen sewa tunggal.
2. Tidak mencatat sewa atas aset tak berwujud berdasarkan PSAK No. 73.

1. Not to separate the non-leased component from lease component, and choose to record the lease component and non-leased component as a single lease component.
2. Not to record the lease of intangible assets according to SFAS No. 73.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

o. Aset hak guna dan liabilitas sewa (lanjutan)

**o. Right-of use assets and lease liabilities
(continued)**

c) Dampak pada akuntansi lessee

c) Impact on lessee accounting

Bank menerapkan pendekatan pengakuan dan pengukuran tunggal untuk seluruh sewa, kecuali untuk sewa jangka pendek dan sewa aset bernilai rendah. Bank mengakui liabilitas sewa untuk melakukan pembayaran sewa dan aset hak guna yang mewakili hak untuk menggunakan aset pendasar.

Bank applies a single recognition and measurement approach for the entire lease, except for the short terms and low-value lease. Bank recognises lease liabilities for the lease payments and right of use asset that represent right of use of the underlying asset

Bank mengakui aset hak guna dan liabilitas sewa pada tanggal permulaan sewa.

Bank recognises right of use asset and lease liabilities at the commencement date.

Pada tanggal permulaan sewa, aset hak guna diukur pada biaya perolehan yang meliputi jumlah pengukuran awal liabilitas sewa, biaya langsung awal yang dikeluarkan, estimasi biaya restorasi dan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal mulai sewa dikurangi insentif sewa yang diterima. Untuk pengukuran selanjutnya, aset hak guna dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan kerugian penurunan nilai, serta disesuaikan untuk setiap pengukuran kembali liabilitas sewa.

On the commencement date, right of use assets measured at cost, which shall comprise the amount initial measurement of lease liabilities, initial direct cost incurred, an estimate of restoration cost, and lease payments made at or before the commencement date less the rental incentives received. For the subsequent measurements, the right of use assets less the accumulated depreciation, any accumulated impairment losses, and adjusted for any remeasurement of lease liabilities.

Aset hak guna disusutkan dengan metode sesuai dengan persyaratan depresiasi yang ada pada aset tetap.

Right of use assets depreciated by methods in accordance with the fixed assets depreciation requirements.

Jika kepemilikan aset sewa dialihkan ke Bank pada akhir masa sewa atau pembayaran sewa mencerminkan pelaksanaan opsi pembelian, penyusutan dihitung menggunakan estimasi masa manfaat ekonomis aset. Aset hak guna diuji penurunan nilainya sesuai dengan PSAK No. 48 Penurunan Nilai Aset.

If the ownership of lease assets transferred to the Bank at the end of the lease term or the lease payments reflects the purchase option, then the depreciation period measured by using the estimation of asset economic benefit. The right of use asset tested for impairment in accordance with SFAS No. 48 Impairment of Asset.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

o. Aset hak guna dan liabilitas sewa (lanjutan)

o. Right-of use assets and lease liabilities (continued)

Pada tanggal permulaan sewa, Bank mengakui liabilitas sewa yang diukur pada nilai kini dari pembayaran sewa masa depan yang akan dilakukan selama masa sewa. Pembayaran sewa termasuk pembayaran tetap (termasuk pembayaran tetap secara-substansi) dikurangi piutang insentif sewa, pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau kurs, dan jumlah yang diharapkan akan dibayar dalam jaminan nilai residu. Pembayaran sewa juga termasuk harga eksekusi opsi pembelian yang wajar jika dipastikan akan dilakukan oleh Bank dan pembayaran penalti untuk mengakhiri sewa, jika jangka waktu sewa mencerminkan Bank mengeksekusi opsi penghentian sewa. Pembayaran sewa variabel yang tidak bergantung pada indeks atau kurs diakui sebagai beban pada periode di mana peristiwa atau kondisi yang memicu pembayaran terjadi.

At the commencement date, Bank recognized the lease liabilities measured at the present value of the future lease payment during the lease term. Lease payment including the fixed payment (including substantial fixed-payments) less lease incentive receivable, variable lease payment that depend on the index or exchange rate, and the expected amount will be paid in a residual value guarantee. Lease payments also include the execution price of a reasonable purchase option if it ensured to exercise by the Bank and the penalty payment to terminate the lease, if the lease term reflects the Bank to execute the lease termination option. Variable lease payments that do not rely on the index or exchange rates recognized as expense in periods in which events or conditions that trigger payments occur.

Dalam menghitung nilai kini dari pembayaran sewa, Bank menggunakan suku bunga pinjaman inkremental penyewa pada tanggal dimulainya sewa karena suku bunga implisit dalam sewa tidak dapat ditentukan. Untuk pengukuran selanjutnya, jumlah liabilitas sewa ditingkatkan untuk mencerminkan pertambahan bunga dan dikurangi pembayaran sewa yang dilakukan. Selain itu, jumlah tercatat liabilitas sewa diukur kembali jika terdapat modifikasi, perubahan jangka waktu sewa, perubahan pembayaran sewa, atau perubahan dalam penilaian opsi untuk membeli aset pendasar.

In calculating the present value of lease payments, Bank uses the incremental borrowing rate of the lessee at the commencement date of the lease, as the implicit interest rate of the lease cannot be determined. For the subsequent measurement, amount of lease liabilities increased to reflect the increasing of interest and reduced by the lease payments. In addition, the carrying amount of lease liabilities remeasured if there is a modification, change in lease term, change of lease payment, or changes in assessment of purchase option of the underlying asset.

PSAK No. 73 mengubah cara Bank menyajikan sewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai sewa operasi pada PSAK No. 30, yang tidak diungkapkan dalam laporan keuangan, dengan rincian sebagai berikut:

SFAS No. 73 changes the way of Bank presents lease that previously classified as an operating lease in SFAS No. 30, which not disclosed in financial statements, with the details of below:

1. Menyajikan aset hak-guna secara terpisah;
2. Menyajikan liabilitas sewa sebagai bagian dari liabilitas lain-lain;
3. Menyajikan beban penyusutan aset hak-guna dan beban bunga liabilitas sewa sebagai bagian dari beban umum dan administrasi; dan
4. Memisahkan jumlah total pembayaran ke bagian pokok (disajikan dalam kegiatan pendanaan) dan bunga (disajikan dalam kegiatan operasional) dalam laporan arus kas

1. Present the right of use asset separately
2. Present the lease liabilities as part of other liabilities
3. Present the depreciation expense of right of use asset and interest expense of lease liabilities as part of general and administrative expenses, and
4. Separate the total amount of payment to the principal (presented in financing activities) and interest (presented in operational activities) in the statement of cash flow.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

p. Penurunan nilai aset non-keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan, Bank menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, maka Bank akan membuat estimasi atas jumlah terpulihkan aset tersebut.

Jumlah terpulihkan yang ditentukan untuk aset individual adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset atau Unit Penghasil Kas (UPK) dikurangi biaya pelepasan dengan nilai pakainya, kecuali aset tersebut tidak menghasilkan arus kas masuk yang sebagian besar independen dari aset atau kelompok aset lain.

Jika nilai tercatat aset lebih besar daripada nilai terpulihkannya, maka aset tersebut dianggap mengalami penurunan nilai dan nilai tercatat aset diturunkan menjadi sebesar nilai terpulihkannya. Rugi penurunan nilai dari operasi yang berkelanjutan diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain sebagai "rugi penurunan nilai".

Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa depan neto didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini atas nilai waktu uang dan risiko spesifik aset.

Dalam menentukan nilai wajar dikurangi biaya pelepasan, mengacu pada PSAK No. 68: "Pengukuran Nilai Wajar" (Catatan 2e).

Kerugian penurunan nilai dari operasi yang berkelanjutan, jika ada, diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain sesuai dengan kategori biaya yang konsisten dengan fungsi aset yang diturunkan nilainya.

q. Biaya dibayar dimuka

Biaya dibayar di muka diamortisasi selama masa manfaat dengan menggunakan metode garis lurus (*straight-line method*).

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

p. Impairment of non-financial assets

The Bank assesses at each annual reporting period whether there is an indication that an asset may be impaired. If any such indication exists, Bank makes an estimate of the asset's recoverable amount.

An asset's recoverable amount is the higher of an asset's or Cash Generating Unit (CGU)'s fair value less costs of disposal and its value in use, and is determined for an individual asset, unless the asset does not generate cash inflows that are largely independent of those from other assets or groups of assets.

Where the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount, the asset is considered impaired and is written down to its recoverable amount. Impairment losses of continuing operations are recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income as "impairment losses".

In assessing the value in use, the estimated net future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset.

In determining fair value less costs of disposal, refers to SFAS No. 68, "Fair Value Measurements" (Note 2e).

Impairment losses of continuing operations, if any, are recognized in the statements of profit or loss and other comprehensive income under expense categories that are consistent with the functions of the impaired assets.

q. Prepaid expenses

Prepaid expenses are amortized over the periods benefited using the straight-line method.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

r. Liabilitas segera

r. Liabilities due immediately

Liabilitas segera dicatat pada saat timbulnya kewajiban atau diterimanya perintah pemindahbukuan dari nasabah maupun dari bank lain.

This account is recorded at the time the obligations occur or upon receipt of transfer orders from customers or other banks.

Liabilitas segera dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi dan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan lainnya.

Current liabilities are stated at amortized cost and classified as other financial liabilities.

s. Simpanan

s. Deposits

Giro merupakan simpanan nasabah yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat melalui cek atau pemindahbukuan dengan bilyet giro dan sarana perintah pembayaran lainnya. Giro dinyatakan sebesar nilai titipan pemegang giro di Bank.

Demand deposits represent customer funds which can be used as payment instruments, and can be withdrawn at any time through cheque, or transferred through current account drafts and other transfer instruction media. Demand deposits are stated at the amounts entrusted to the Bank by the depositors.

Giro *Wadiah* merupakan titipan dana pihak ketiga yang setiap saat tersedia untuk dikembalikan dan dapat diberikan bonus sesuai kebijakan Bank. Giro *Wadiah* dinyatakan sebesar nilai titipan pemegang giro di Bank.

Wadiah demand deposits represent entrusted third party funds which are available for withdrawal at any time and earn bonus based on the Bank's policy. Wadiah demand deposits are stated at the amounts invested by the depositors in the Bank.

Tabungan merupakan simpanan nasabah yang penarikannya hanya dapat dilakukan nasabah sesuai dengan persyaratan tertentu yang disepakati. Tabungan dinyatakan sebesar nilai kewajiban pada pemilik tabungan.

Savings deposits represent customer funds which can be withdrawn by the depositors only under certain conditions. Savings deposits are stated at the agreed amounts due to the depositors.

Tabungan *Wadiah* merupakan simpanan pihak lain yang mendapatkan bonus berdasarkan kebijaksanaan Bank. Tabungan *Wadiah* dinyatakan sebesar nilai investasi pemegang tabungan di Bank.

Wadiah savings deposits represent third party funds which earn bonus based on the Bank's policy. Wadiah savings deposits are stated at the amounts invested by the depositors in the Bank.

Deposito berjangka merupakan simpanan nasabah yang penarikannya hanya dapat dilakukan nasabah pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara pemegang deposito berjangka dengan Bank. Deposito berjangka dinyatakan sebesar nilai nominal yang tercantum dalam sertifikat yang diterbitkan oleh Bank, sesuai dengan perjanjian antara pemegang deposito berjangka dengan Bank.

Time deposits represent customer funds which can be withdrawn by the depositors only on specific maturity dates based on the agreements between the depositors and the Bank. Time deposits are stated at the nominal amounts stated in the certificates issued by the Bank in accordance with the agreements between the depositors and the Bank.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

s. Simpanan (lanjutan)

Simpanan nasabah diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan lainnya dan diukur pada biaya perolehan amortisasi menggunakan suku bunga efektif kecuali simpanan yang didasarkan pada prinsip perbankan syariah yang dinyatakan sebesar kewajiban Bank kepada nasabah. Biaya tambahan yang dapat diatribusikan secara langsung kepada perolehan simpanan nasabah, dikurangkan dari jumlah simpanan yang diterima.

t. Simpanan dari bank lain

Simpanan dari bank lain merupakan kewajiban kepada bank lain, dalam bentuk tabungan, giro, deposito berjangka dan *inter-bank call money*.

Di dalam simpanan dari bank lain termasuk simpanan syariah dalam bentuk giro *wadiah*.

Simpanan dari bank lain diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan lain dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan suku bunga efektif kecuali simpanan syariah yang dinyatakan sebesar nilai kewajiban Bank kepada nasabah. Biaya tambahan yang dapat diatribusikan secara langsung kepada perolehan simpanan dari bank lain dikurangkan dari jumlah simpanan yang diterima.

u. Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali dan efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali

Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali

Efek-efek yang dibeli dengan janji untuk dijual kembali disajikan sebagai aset keuangan dalam laporan posisi keuangan sebesar jumlah penjualan kembali dikurangi dengan bunga yang belum diamortisasi dan cadangan kerugian penurunan nilai.

Selisih antara harga beli dan harga jual kembali diperlakukan sebagai pendapatan bunga yang ditangguhkan (belum diamortisasi) dan diakui sebagai pendapatan selama periode sejak efek-efek tersebut dibeli hingga dijual kembali dengan menggunakan suku bunga efektif.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

s. Deposits (continued)

Deposits from customers are classified as other financial liabilities and measured at amortized cost using the effective interest method except for sharia deposits which are stated at the Bank's liability to the customers. Incremental costs that can be attributed directly to the acquisition of deposits from customers are deducted from total deposits received.

t. Deposits from other banks

Deposits from other banks represent liabilities to other banks, in the form of savings deposits, demand deposits, time deposits and inter-bank call money.

Deposits from other banks include sharia deposits in the form of wadiah demand deposits.

Deposits from other banks are classified as other financial liabilities and measured at amortized cost using the effective interest method except for sharia deposits which are stated at the Bank's liability amount to the customer. Incremental costs that can be attributed directly to the acquisition of deposits from other banks are deducted from the total deposits received.

u. Securities purchased under agreement to resell and securities sold under agreement to repurchase

Securities purchased under agreement to resell

Securities purchased under agreement to resell are presented as financial assets in the statement of financial position, at the net resale price of unamortized interest and net of allowance for impairment losses.

The difference between the purchase price and the resale price is treated as unearned interest income (unamortized) and recognized as income over the period starting from when those securities are purchased until they are resold using effective interest rate.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

u. Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali dan efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali (lanjutan)

Efek-efek yang dibeli dengan janji untuk dijual kembali diklasifikasikan sebagai diukur pada biaya perolehan amortisasi.

Efek-efek yang dijual dengan janji untuk dibeli kembali disajikan sebagai liabilitas dalam laporan posisi keuangan sebesar jumlah pembelian kembali, dikurangi dengan bunga dibayar dimuka yang belum diamortisasi.

Selisih antara harga jual dan harga beli kembali diperlakukan sebagai biaya dibayar dimuka dan diakui sebagai beban selama jangka waktu sejak efek-efek tersebut dijual hingga dibeli kembali menggunakan metode suku bunga efektif.

Efek-efek yang dijual dengan janji untuk dibeli kembali diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali atas surat berharga syariah

Bank mencatat transaksi efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali mengacu ke PSAK No. 111 tentang "Akuntansi Wa'd" yang berlaku secara prospektif. Pada saat pengakuan awal, Bank mengklasifikasikan surat berharga syariah yang diperoleh dari transaksi jual beli pertama dalam kategori diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Keuntungan atau kerugian dari perubahan nilai wajar diakui dalam penghasilan komprehensif lain.

v. Surat-surat berharga yang diterbitkan

Surat-surat berharga yang diterbitkan Bank adalah obligasi, Long Term Note (LTN) dan Sukuk Mudharabah.

Surat berharga yang diterbitkan diakui sebesar nilai wajar pada awalnya dan selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif (EIR).

Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan adanya diskonto atau premi terkait dengan pengakuan awal dan biaya transaksi yang tidak terpisah dari suku bunga efektif.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

u. Securities purchased under agreement to resell and securities sold under agreement to repurchase (continued)

Securities purchased under agreement are classified as amortized costs.

Securities sold under agreements to repurchase are presented as liabilities in the statement of financial position, at the repurchase price, net of unamortized prepaid interest.

The difference between the selling price and the repurchase price is treated as prepaid expenses and recognized as expense over the period starting from when those securities are sold until they are repurchased using the effective interest method.

Securities sold under agreement to repurchase are classified as financial liabilities measured at amortized cost.

Securities purchased under agreement to resell of sharia-compliant securities

The Bank records securities purchased under resale agreements in accordance with SFAS No. 111 on "Accounting for Wa'd" which is implemented prospectively. At initial recognition, the Bank classifies the underlying securities from the first sale and purchase transaction as at fair value through other comprehensive income. Gain or losses arising from changes in its fair value is recorded as other comprehensive income.

v. Securities issued

Securities issued by Bank consist of bonds, Long Term Note (LTN) and Sukuk Mudharabah.

The securities issued are recognized initially at fair value and subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method (EIR).

Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium associated related to the initial recognition and transaction costs that are an integral part of the effective interest rate.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

w. Pinjaman yang diterima

Pinjaman yang diterima merupakan dana yang diterima oleh Bank dari Bank Indonesia, pemerintah dan lembaga pembiayaan lain dengan kewajiban pembayaran berdasarkan perjanjian pinjaman.

w. Fund borrowings

Fund borrowings are funds received by the Bank from Bank Indonesia, the government and other financing institutions with payment obligation based on borrowing agreements.

Pinjaman yang diterima diakui sebesar nilai wajar pada awalnya dan selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif (EIR). Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan adanya diskonto atau premi terkait dengan pengakuan awal dan biaya transaksi yang tidak terpisah dari suku bunga efektif.

Fund borrowings are recognized initially at fair value and subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method (EIR). Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium associated related to the initial recognition and transaction costs that are an integral part of the effective interest rate.

x. Pinjaman subordinasi

Pinjaman subordinasi diakui sebesar nilai wajar pada awalnya dan selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan adanya diskonto atau premi terkait dengan pengakuan awal dan biaya transaksi yang tidak terpisah dari suku bunga efektif.

x. Subordinated loans

Subordinated loans are recognized initially at fair value and subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method. Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium associated related to the initial recognition and transaction costs that are an integral part of the effective interest rate.

y. Modal saham

Modal saham diukur pada nilai nominal untuk semua saham yang diterbitkan.

y. Capital stock

Capital stock is measured at par value for all shares issued.

z. Saldo laba

Saldo laba merupakan saldo kumulatif dari hasil operasi Bank, pembagian dividen, penyesuaian periode sebelumnya, efek dari perubahan kebijakan akuntansi dan penyesuaian modal lainnya.

z. Retained earnings

Retained earnings represent the cumulative balance of the Bank's results of operations, dividend distributions, prior period adjustments, effects of the changes in accounting policy and other capital adjustments.

aa. Dana syirkah temporer

Dana syirkah temporer merupakan investasi dengan akad *mudharabah mutlaqah*, yaitu pemilik dana (*shahibul maal*) memberikan kebebasan kepada pengelola dana (*mudharib*/BTN Unit Syariah) dalam pengelolaan investasinya dengan keuntungan dibagikan sesuai kesepakatan. Dana syirkah temporer terdiri dari giro *mudharabah*, tabungan *mudharabah*, dan deposito *mudharabah*.

aa. Temporary syirkah funds

Temporary syirkah funds represent investments from other parties conducted on the basis mudharabah mutlaqah contract in which the owners of the funds (shahibul maal) grant freedom to the fund manager (mudharib/BTN Sharia Unit) in the management of their investments with profit distributed based on the contract. Temporary syirkah funds consist of mudharabah current accounts, mudharabah saving deposits, and mudharabah time deposits.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

aa. Dana syirkah temporer (lanjutan)

aa. Temporary syirkah funds (continued)

Giro dan tabungan *mudharabah* merupakan investasi yang bisa ditarik kapan saja (*on call*) atau sesuai dengan persyaratan tertentu yang disepakati. Giro dan tabungan *mudharabah* dinyatakan sebesar saldo giro dan tabungan nasabah di Bank.

Mudharabah current accounts and saving deposits represent investment which could be withdrawn anytime (on call) or can be withdrawn based on certain agreed terms. Mudharabah current accounts and savings deposits are stated based on the customer's demand and savings deposit balance in Bank.

Deposito *mudharabah* merupakan investasi yang hanya bisa ditarik pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara pemegang deposito *mudharabah* dengan Bank. Deposito *mudharabah* dinyatakan sebesar nilai nominal sesuai dengan perjanjian antara pemegang deposito dengan Bank.

Mudharabah time deposits represent investment that can only be withdrawn at a certain time based on the agreement between the customer and the Bank. Mudharabah time deposits are stated at nominal amount as agreed between the deposit holder and the Bank.

Dana *syirkah* temporer tidak dapat digolongkan sebagai kewajiban. Hal ini karena BTN Unit Syariah tidak berkewajiban untuk mengembalikan jumlah dana awal dari pemilik dana kecuali akibat kelalaian atau wanprestasi ketika mengalami kerugian. Di sisi lain dana *syirkah* temporer tidak dapat digolongkan sebagai ekuitas karena mempunyai waktu jatuh tempo dan pemilik dana tidak mempunyai hak kepemilikan yang sama dengan pemegang saham seperti hak *voting* dan hak atas realisasi keuntungan yang berasal dari aset lancar dan aset non-investasi (*current and other non-investment accounts*).

Temporary syirkah fund cannot be classified as liability. This was due to the BTN Sharia Unit does not have any liability to return the initial fund to the owners, except for losses due to BTN Sharia Unit's management negligence or default of loss is incurred. On the other hand, temporary syirkah fund cannot be classified as shareholders' equity, because of the maturity period and the depositors do not have the same rights as the shareholders' such as voting rights and the rights of realized gain from current assets and other non-investment accounts.

Pemilik dana *syirkah* temporer mendapatkan imbalan bagi hasil sesuai dengan *nisbah* yang ditetapkan.

The owner of temporary syirkah funds receives a return from the profit sharing based on a predetermined ratio.

Hak nasabah atas bagi hasil dana *syirkah* temporer merupakan bagian bagi hasil milik nasabah yang didasarkan pada prinsip *mudharabah* atas hasil pengelolaan dana mereka oleh Bank. Pendapatan yang dibagikan adalah yang telah diterima (*cash basis*).

Third parties' share on returns of temporary syirkah funds represents customer's share on the Bank's income derived from the management of their funds by the Bank under mudharabah principles. Income that will be distributed is the cash received (cash basis) from the share.

Pembagian hasil usaha dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil usaha yaitu dari pendapatan Bank yang diterima berupa laba kotor (*gross profit margin*).

The distribution of revenue is based on profit sharing scheme on the Bank's gross profit margin.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

aa. Dana syirkah temporer (lanjutan)

aa. Temporary syirkah funds (continued)

Pendapatan margin dan bagi hasil atas pembiayaan yang diberikan dan atas aset produktif lainnya akan dibagikan kepada nasabah penyimpan dana dan Bank sesuai dengan proporsi dana yang dipakai dalam pembiayaan yang diberikan dan aset produktif lainnya. Selanjutnya, pendapatan margin dan bagi hasil yang tersedia untuk nasabah tersebut kemudian dibagikan ke nasabah penabung dan deposan sebagai *shahibul maal* dan Bank sebagai *mudharib* sesuai porsi bagi hasil yang telah disepakati bersama sebelumnya (*nisbah*). Pendapatan margin dan bagi hasil dari pembiayaan dan aset produktif lainnya yang memakai dana Bank, seluruhnya menjadi milik Bank, termasuk pendapatan dari investasi Bank berbasis imbalan.

Margin income and profit sharing on financing facilities and other earning assets are distributed to fund owners and the Bank based on proportion of fund used in the financing and other earning assets. Margin income and profit sharing income allocated to the fund owners are then distributed to fund owners and depositors as *shahibul maal* and the Bank as *mudharib* based on a predetermined ratio (*nisbah*). Margin income and profit sharing from financing facilities and other earning assets using the Bank's funds, are entirely shared for the Bank, including income from the Bank's fee-based transactions.

ab. Pendapatan dan beban bunga

ab. Interest income and expense

Pendapatan dan beban bunga diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari aset keuangan atau liabilitas keuangan (atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat) untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset keuangan atau liabilitas keuangan.

Interest income and expenses are recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income using the effective interest rate method. The effective interest rate is the rate that exactly discounts the estimated future cash payments or receipts over the expected life of the financial instrument (or, where appropriate, a shorter period) to obtain the carrying amount of the financial asset or financial liability.

Pada saat menghitung suku bunga efektif, Bank mengestimasi arus kas di masa datang dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian kredit di masa mendatang. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi, provisi, dan bentuk lain yang diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari suku bunga efektif.

When calculating the effective interest rate, the Bank estimates future cash flows considering all contractual terms of the financial instrument but not future credit losses. This calculation includes all commissions, fees, and other forms received by the parties in the contract that are an integral part of the effective interest rate.

Jika aset keuangan atau nilai kelompok aset keuangan serupa telah diturunkan sebagai akibat kerugian penurunan nilai, maka pendapatan bunga yang diperoleh setelahnya diakui berdasarkan suku bunga yang digunakan untuk mendiskonto arus kas masa datang dalam menghitung kerugian penurunan nilai.

If a financial asset or group of similar financial assets' value has diminished as a result of impairment losses, interest income subsequently obtained is recognized based on the interest rate used to discount future cash flows in calculating impairment losses.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

ac. Pendapatan provisi dan komisi

Pendapatan provisi dan komisi yang berkaitan langsung dengan kegiatan pinjaman, atau pendapatan provisi dan komisi yang berhubungan dengan jangka waktu tertentu, diamortisasi sesuai dengan jangka waktu kontrak menggunakan metode suku bunga efektif dan diklasifikasikan sebagai bagian dari pendapatan bunga pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Pendapatan provisi dan komisi yang tidak berkaitan dengan kegiatan pemberian kredit atau suatu jangka waktu dan/atau terkait dengan pemberian suatu jasa, diakui sebagai pendapatan pada saat terjadinya transaksi dan dicatat pada akun pendapatan operasional lainnya.

ad. Pendapatan bagi hasil dan beban bonus secara syariah

Pendapatan bagi hasil secara syariah merupakan pendapatan *istishna*, margin *murabahah* dan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* serta aset produktif lainnya yang diakui dengan menggunakan metode akrual. Beban secara syariah merupakan distribusi bonus dan bagi hasil kepada pemilik dana yang diakui berdasarkan metode akrual.

Pendapatan *istishna* diakui apabila telah terjadi penyerahan barang.

Pendapatan atas piutang *murabahah* menggunakan metode setara tingkat imbal hasil efektif (margin efektif). Margin efektif adalah margin yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari piutang *murabahah*. Pada saat menghitung margin efektif, Bank mengestimasi arus kas di masa datang dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian piutang di masa mendatang. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi, provisi dan bentuk lain yang diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian tak terpisahkan dari margin efektif, biaya transaksi, dan seluruh premi atau diskon lainnya.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

ac. Fees and commissions

Fees and commissions directly related to lending activities, or fee and commission income which relates to a specific period, is amortized over the term of the contract using the effective interest method and classified as part of interest income in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

Fees and commissions that are not related to the credit activity or a period of time and/or associated with the service provided, are recognized as revenue at the time of the transaction and recorded under other operating income.

ad. Sharia profit sharing income and bonus expense

Sharia profit sharing income represents income from istishna, margin from murabahah and profit-sharing on mudharabah and musyarakah financing and other earning assets which are recognized on the accrual basis. Sharia expense represents the bonus distribution and profit-sharing to fund owners which are recognized on an accrual basis.

Income from istishna is recognized at the date of transfer of assets.

Income from murabahah receivables using the effective rate of return method (effective margin). Effective margin is the margin that precisely discounts the estimated future cash payments or receipts through the expected life of the murabahah receivables. When calculating the effective margin, Bank estimates the future cash flows considering all contractual terms of the financial instrument, but does not consider the loss of receivables in the future. This calculation includes all commissions, provision fees and other forms accepted by the parties in the contract that are an inseparable part of the effective margin, transaction costs and all other premiums or discounts.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

ad. Pendapatan bagi hasil dan beban bonus secara Syariah (lanjutan)

Pendapatan bagi hasil pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* diakui pada saat diterima atau dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai porsi bagi hasil (nisbah) yang disepakati.

ae. Imbalan kerja

Imbalan kerja jangka pendek

Imbalan kerja jangka pendek seperti upah, iuran jaminan sosial, cuti jangka pendek, bonus dan imbalan non-moneter lainnya diakui selama periode jasa diberikan. Imbalan kerja jangka pendek dihitung sebesar jumlah yang tidak didiskontokan.

Program pensiun iuran pasti

Iuran kepada dana pensiun sebesar persentase tertentu gaji pegawai yang menjadi peserta program pensiun iuran pasti Bank, dicadangkan dan diakui sebagai biaya ketika jasa telah diberikan oleh pegawai-pegawai tersebut. Pembayaran dikurangkan dari utang iuran. Iuran terutang dihitung berdasarkan jumlah yang tidak didiskontokan.

Program imbalan pasti dan imbalan kerja jangka panjang lainnya

Imbalan pasca-kerja dicadangkan dan diakui sebagai biaya ketika jasa telah diberikan oleh pegawai yang menjadi peserta program pensiun Bank. Imbalan kerja ditentukan berdasarkan peraturan Bank dan Undang-undang Cipta Kerja No. 11 tahun 2020 tanggal 2 November 2020 ("Undang-undang").

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

ad. Sharia profit sharing income and bonus expense (continued)

Mudharabah and musyarakah income are recognized when cash is received or in a period where the right of revenue sharing is due based on agreed portion (nisbah).

ae. Employee benefits

Short-term employee benefits

Short-term employee benefits such as wages, social security contributions, short-term compensated leaves, bonuses and other non-monetary benefits are recognized during the period when services have been rendered. Short-term employee benefits are measured using undiscounted amounts.

Defined contribution plan

Contribution payable to a pension fund equivalent to a certain percentage of salaries for qualified employees under the Bank's defined contribution plan is accrued and recognized as expense when services have been rendered by qualified employees. Actual payments are deducted from the contribution payable. Contribution payable is measured using undiscounted amounts.

Defined benefit plan and other long-term employee benefits

The post-employment benefits are accrued and recognized as expense when services have been rendered by qualified employees. The benefits are determined based on the Bank's regulations and Job Creation No. 11 year 2020 dated November 2, 2020 ("the Law").

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

ae. Imbalan kerja (lanjutan)

Program imbalan pasti dan imbalan kerja jangka panjang lainnya (lanjutan)

Imbalan pasca-kerja dan imbalan kerja jangka panjang lainnya secara aktuaris ditentukan berdasarkan metode *Projected Unit Credit*.

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto, yang diakui sebagai penghasilan komprehensif lain, terdiri atas:

- (i) Keuntungan dan kerugian aktuarial.
- (ii) Imbal hasil atas aset program, tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas (aset).
- (iii) Setiap perubahan dampak batas aset, tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas (aset).

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto, yang diakui sebagai penghasilan komprehensif lain tidak direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya.

Untuk imbalan kerja jangka panjang lain atas biaya jasa kini, biaya bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto, dan pengukuran kembali liabilitas (aset) imbalan pasti neto langsung diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan.

Biaya jasa lalu diakui sebagai beban pada tanggal yang lebih awal antara ketika amandemen atau kurtailmen program terjadi, dan ketika biaya restrukturisasi atau pesangon diakui, sehingga biaya jasa lalu yang belum *vested* tidak lagi dapat ditangguhkan dan diakui selama periode *vesting* masa depan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

ae. Employee benefits (continued)

Defined benefit plan and other long-term employee benefits (continued)

The post-employment benefits and other long-term employee benefits are actuarially determined using the *Projected Unit Credit Method*.

Remeasurement of defined benefit liabilities (assets) net, which is recognized as other comprehensive income consist of:

- (i) Actuarial gain and losses.
- (ii) Return on plan assets, excluding amounts that is included in net interest on liabilities (assets).
- (iii) The effect of the asset ceiling, excluding amounts included in the net interest of liabilities (assets).

Remeasurement of defined benefit liabilities (assets) - net, which is recognized as other comprehensive income is not reclassified to profit or loss in the subsequent periods.

For other long-term employee benefits which are current service cost, net interest expense of net defined benefit assets liabilities (assets), and re-measurement of liability (asset) is recognized immediately in the current year statement of profit or loss and other comprehensive income.

Past service costs are recognized as expense at the earlier date between the amendments or curtailment program occurs, and when the costs of restructuring or severance is recognized, therefore, unvested past service cost can no longer be deferred and recognized over the future vesting period.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

af. Transaksi dan saldo dalam mata uang asing

af. Foreign currency transactions and balances

Transaksi dalam mata uang asing dicatat berdasarkan kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pada tanggal laporan posisi keuangan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah berdasarkan kurs *spot Reuters* pada tanggal tersebut pukul 15.00 WIB. Laba atau rugi kurs yang terjadi diakui di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan.

Transactions involving foreign currencies are recorded at the rates of exchange prevailing at the time the transactions are made. At statement of financial position dates, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated into Rupiah based on Reuters' spot rates at 15.00 WIB (West Indonesian local time) on that date. The resulting gains or losses are recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income for the current year.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, kurs yang digunakan untuk menjabarkan mata uang asing ke dalam Rupiah adalah sebagai berikut (Rupiah penuh):

As of December 31, 2023 and 2022, the exchange rates used in translating the foreign currencies into Rupiah are as follows (full Rupiah):

	31 Desember/ December 31, 2023
1 Dolar Amerika Serikat	15.397,00
1 Dolar Australia	10.520,77
1 Pound Sterling Inggris	19.626,56
1 Euro Eropa	17.038,32
1 Yen Jepang	108,88
1 Ringgit Malaysia	3.355,20
1 Dolar Hong Kong	1.970,73
1 Riyal Arab Saudi	4.106,00
1 Renminbi	2.170,06
1 Dolar Singapura	11.676,34

**31 Desember/
December 31, 2022**

15.567,50	1 United States Dollar
10.557,88	1 Australian Dollar
18.786,09	1 Great Britain Pound Sterling
16.581,72	1 European Euro
117,81	1 Japanese Yen
3.533,66	1 Malaysian Ringgit
1.996,55	1 Hong Kong Dollar
4.139,00	1 Saudi Arabian Riyal
2.238,91	1 Renminbi
11.592,88	1 Singapore Dollar

ag. Pajak penghasilan

ag. Income tax

Beban pajak tahun berjalan ditetapkan berdasarkan taksiran penghasilan kena pajak tahun berjalan. Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer aset dan liabilitas antara pelaporan komersial dan pajak pada setiap tanggal pelaporan.

Current tax expense is provided based on the estimated taxable income for the current year. Deferred tax assets and liabilities are recognized for temporary differences between the financial and the tax bases of assets and liabilities at each reporting date.

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan saldo rugi fiskal yang belum dikompensasikan, sepanjang perbedaan temporer dan rugi fiskal yang belum dikompensasikan tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba fiskal pada masa yang akan datang.

Deferred tax assets are recognized for all deductible temporary differences and carry forward of uncompensated tax losses to the extent that it is probable for temporary differences and carry forward of uncompensated tax losses to be utilized in deducting future taxable profit.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

ag. Pajak penghasilan (lanjutan)

ag. Income tax (continued)

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah pada setiap tanggal posisi keuangan dan nilai tercatat aset pajak tangguhan tersebut diturunkan apabila tidak lagi terdapat kemungkinan besar bahwa laba fiskal yang memadai akan tersedia untuk mengkompensasi sebagian atau semua manfaat aset pajak tangguhan.

The carrying amount of deferred tax assets is reviewed at each reporting date and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profits will be available to allow all or part of the benefit of the deferred tax assets to be utilized.

Aset dan kewajiban pajak tangguhan diukur berdasarkan tarif pajak yang akan berlaku pada tahun saat aset direalisasikan atau liabilitas diselesaikan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku atau yang secara substantif telah diberlakukan pada tanggal laporan posisi keuangan.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the year when the asset is realized or the liability is settled based on tax laws that have been enacted or substantively enacted as at statement financial position date.

Pengaruh pajak terkait dengan penyisihan untuk dan/atau pembalikan seluruh perbedaan temporer selama tahun berjalan, termasuk pengaruh perubahan tarif pajak, diakui sebagai "Beban Pajak Penghasilan - Tangguhan" dan termasuk dalam laba atau rugi neto tahun berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

The related tax effects of the provisions for and/or reversals of all temporary differences during the year, including the effect of change in tax rates, are recognized as "Income Tax Expense - Deferred" and included in the determination of net profit or loss for the year, except to the extent that they relate to items previously charged or credited to equity.

Perubahan terhadap liabilitas pajak diakui pada saat surat ketetapan pajak diterima, atau apabila diajukan keberatan dan atau banding oleh Bank, pada saat telah ada keputusan atas banding dan atau keberatan tersebut.

Amendment to tax obligation is recorded when an assessment letter is received or, if objected to or appealed against by the Bank, when the result of such appeal or objection is determined.

Dalam menentukan jumlah pajak kini dan tangguhan, Bank memperhitungkan dampak atas posisi pajak yang tidak pasti dan tambahan pajak serta penalti. Hal ini termasuk juga melakukan evaluasi terhadap surat ketetapan pajak yang diterima dari kantor pajak.

In determining the amount of current and deferred tax, the Bank takes into account the impact of uncertain tax positions and any additional taxes and penalties. This includes evaluation on tax assessment letters received from tax authorities.

Aset dan liabilitas atas pajak tangguhan dan pajak kini dapat saling hapus apabila terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus.

Assets and liabilities on deferred tax and current tax can be offset if there is a legal enforceable right to offset.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

ah. Pelaporan segmen

ah. Segment reporting

Informasi segmen diungkapkan untuk memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi sifat dan dampak keuangan dari aktivitas bisnis yang mana Bank terlibat dalam lingkungan ekonomi dimana Bank beroperasi.

Segment information is disclosed to enable users of financial statements to evaluate the nature and financial effects of the business activities in which the Bank is involved in and the economic environment where the Bank operates.

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

An operating segment is a component of an entity:

a) Yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);

a) That engages in business activities from which it may earn revenues and incur expenses (including revenues and expenses relating to transactions with other components of the same entity);

b) Hasil operasinya dikaji ulang secara reguler oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan

b) Whose operating results are reviewed regularly by the entity's chief operating decision maker to make decisions about resources to be allocated to the segment and assess its performance; and

c) Tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

c) For which discrete financial information is available.

Bank telah mengidentifikasi dan mengungkapkan informasi keuangan berdasarkan kegiatan bisnis dimana Bank terlibat (segmen usaha). Segmen pendapatan, biaya, hasil, aset dan liabilitas, termasuk bagian yang dapat diatribusikan langsung kepada segmen, serta yang dapat dialokasikan dengan dasar yang memadai untuk segmen tersebut.

The Bank identifies and discloses financial information based on the business activities in which the Bank engages (business segments) in. Segment revenues, expenses, income, assets and liabilities include items directly attributable to a segment as well as those that can be allocated on a reasonable basis to that segment.

ai. Laba per saham dasar

ai. Basic earnings per share

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba tahun berjalan dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang ditempatkan dan disetor penuh pada tahun yang bersangkutan.

Basic earnings per share is computed by dividing income for the year by the weighted average number of issued and fully paid shares during the related year.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

aj. Biaya emisi penerbitan saham

Biaya-biaya emisi efek yang terjadi sehubungan dengan penawaran saham kepada masyarakat (termasuk penerbitan hak memesan efek terlebih dahulu) dikurangkan langsung dari hasil emisi dan disajikan sebagai pengurang pada akun "Tambah Modal Disetor - Neto", sebagai bagian dari Ekuitas pada laporan posisi keuangan.

aj. Shares issuance costs

Costs related to the public offering of shares (including pre-emptive rights issue) are deducted from the proceeds and presented as a deduction from the "Additional Paid-in-Capital - Net" account, under Equity section in the statement of financial position.

ak. Opsi Saham

Bank telah memberikan opsi saham kepada Direksi dan pekerja pada posisi dan jabatan tertentu berdasarkan persyaratan yang telah ditetapkan. Biaya kompensasi saham pada penerbitan dihitung dengan menggunakan nilai wajar dari opsi saham tersebut dan diakui dalam akun "Beban Tenaga Kerja dan Tunjangan" menggunakan metode garis lurus selama masa tunggu (*vesting period*). Akumulasi dari biaya kompensasi saham diakui sebagai "Opsi Saham" dalam bagian ekuitas. Penentuan nilai wajar dari opsi saham yang diberikan dihitung dengan menggunakan model penentuan harga opsi *Binomial-tree* (*Binomial-tree option pricing model*).

ak. Stock Options

The Bank has granted stock options to the Board of Directors and employees of certain positions and levels based on established criteria. Cost of stock compensation at the issuance date is calculated using the fair value of the stock options and is recognized as part of "Salaries and Employee Benefits Expense" using the straight-line method over the vesting period. The accumulation of the stock compensation cost is recognized as "Stock Options" in the equity. The fair value of the stock options granted are calculated using the *Binomial-tree option pricing model*.

al. Provisi

Provisi diakui jika Bank memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) yang akibat peristiwa masa lalu, besar kemungkinannya penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Provisi ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik yang paling kini. Jika arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban kemungkinan besar tidak terjadi, maka provisi dibatalkan.

al. Provisions

Provisions are recognized when the Bank has a present obligation (legal or constructive) where, as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

Provisions are reviewed at each reporting date and adjusted to reflect the current best estimate. If it is no longer probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, the provision is reversed.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

am. Agunan yang diambil alih

am. Foreclosed collaterals

Agunan yang diambil alih disajikan dalam akun "Aset Lain-lain"

Foreclosed collaterals are included in the "Other Assets" account.

Agunan yang diambil alih (AYDA) adalah aset yang diperoleh Bank baik melalui pelelangan maupun diluar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual diluar lelang dari pemilik agunan dalam hal debitur tidak memenuhi liabilitasnya kepada Bank. AYDA merupakan jaminan kredit yang diberikan yang telah diambil alih sebagai bagian dari penyelesaian kredit yang diberikan dan disajikan pada "Aset Lain-lain"

Foreclosed collaterals represent assets acquired by the Bank both from auction and non auction based on voluntary transfer by the debtor or based on debtor's approval to sell the collateral where the debtor could not fulfill their obligations to the Bank. Foreclosed collaterals represent loan collateral that were taken over as part of loans settlement and presented in "Other Assets".

Agunan yang diambil alih diakui sebesar nilai neto yang dapat direalisasi atau sebesar nilai outstanding kredit yang diberikan, mana yang lebih rendah. Nilai neto yang dapat direalisasi adalah nilai wajar agunan yang diambil alih dikurangi dengan estimasi biaya untuk menjual agunan tersebut. Selisih lebih saldo kredit di atas nilai neto yang dapat direalisasi dari agunan yang diambil alih dibebankan ke dalam akun cadangan kerugian penurunan nilai aset. Selisih antara nilai agunan yang diambil alih dengan hasil penjualan diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat penjualan.

Foreclosed collaterals are stated at net realizable value or stated at loan outstanding amount, whichever is lower. Net realizable value is the fair value of the foreclosed collaterals less the estimated costs to sell the assets. The excess of loan receivable over the net realizable value of the foreclosed collateral is charged to allowance for impairment losses. The difference between the recorded amount of the foreclosed collateral and the proceeds from the sale of such collateral is recorded as a gain or loss at the time of sale.

Beban-beban yang berkaitan dengan pemeliharaan agunan yang diambil alih dibebankan dalam laporan laba rugi pada saat terjadinya.

Maintenance and repair costs related to foreclosed collaterals are charged as an expense in profit or loss when incurred.

Bila terjadi penurunan nilai yang bersifat permanen, maka nilai tercatatnya dikurangi untuk mengakui penurunan tersebut dan kerugiannya dibebankan dalam laporan laba rugi.

If there is permanent decline in value, the carrying amount of foreclosed collaterals is written down to recognize such permanent decline in value and any losses from such write-down is recognized in profit or loss.

an. Instrumen derivatif

an. Derivative Instruments

Instrumen keuangan derivatif diukur dan diakui di laporan posisi keuangan pada nilai wajar.

Derivatives financial instruments are valued and recognized in the statement of financial position at fair value net of allowance for possible losses.

Setiap kontrak derivatif dicatat sebagai aset apabila memiliki nilai wajar positif dan sebagai liabilitas apabila memiliki nilai wajar negatif.

Each derivatives contract is recorded as asset when the fair value is positive and as liability when the fair value is negative.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

an. Instrumen derivatif (lanjutan)

an. Derivative Instruments (continued)

Tagihan dan liabilitas derivatif diklasifikasikan sebagai aset dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Derivatives receivable and payable are classified as financial assets and liabilities measured at fair value through profit or loss.

Keuntungan atau kerugian yang terjadi dari perubahan nilai wajar diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Gains or losses resulting from fair value changes are recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

Nilai wajar instrumen derivatif ditentukan berdasarkan diskonto arus kas dan model penentu harga atau harga yang diberikan oleh broker (*quoted price*) atas instrumen lainnya yang memiliki karakteristik serupa, yang mengacu pada PSAK No. 68, "Pengukuran Nilai Wajar" (Catatan 2e).

The fair value of derivatives instruments is determined based on discounted cash flows and pricing models or quoted prices from brokers of other instruments with similar characteristics, which refers to SFAS No. 68, "Fair Value Measurement" (Note 2e).

Keuntungan atau kerugian dari kontrak derivatif disajikan dalam laporan keuangan berdasarkan tujuan Bank atas transaksi yaitu untuk (a) lindung nilai atas nilai wajar, (b) lindung nilai atas arus kas, (c) lindung nilai atas investasi bersih pada kegiatan operasi luar negeri dan (d) instrumen perdagangan, sebagai berikut:

Gains or losses from derivative contracts are presented in the financial statements based on its purpose designated upon acquisition, as (a) fair value hedge, (b) cash flow hedge, (c) net investment in a foreign operation hedge, and (d) trading instruments as follows:

- a. Keuntungan atau kerugian dari kontrak derivatif yang ditujukan dan memenuhi syarat sebagai instrumen lindung nilai atas nilai wajar dan keuntungan atau kerugian atas perubahan nilai wajar aset dan liabilitas yang dilindungi, diakui sebagai laba atau rugi yang dapat saling hapus dalam periode akuntansi yang sama. Setiap selisih yang terjadi menunjukkan terjadinya ketidakefektifan lindung nilai dan secara langsung diakui sebagai laba atau rugi periode berjalan.
- b. Bagian efektif dari keuntungan atau kerugian atas kontrak derivatif yang ditujukan sebagai lindung nilai atas arus kas dilaporkan sebagai penghasilan komprehensif lain. Bagian yang tidak efektif dari lindung nilai dilaporkan sebagai laba atau rugi periode berjalan.
- c. Keuntungan atau kerugian dari kontrak derivatif yang ditujukan sebagai lindung nilai atas investasi bersih pada kegiatan operasi luar negeri dilaporkan sebagai penghasilan komprehensif lain, sepanjang transaksi tersebut dianggap efektif sebagai transaksi lindung nilai.
- d. Keuntungan atau kerugian dari kontrak derivatif yang tidak ditujukan sebagai instrumen lindung nilai (atau kontrak derivatif yang tidak memenuhi persyaratan sebagai instrumen lindung nilai) diakui sebagai laba atau rugi pada periode berjalan.

- a. *Gain or loss on a derivative contract designated and qualified as a fair value hedging instrument and the gain or loss arising from the changes in fair value of hedged assets and liabilities is recognised as gain or loss that can be set off one another during the same accounting period/year. Any difference representing hedge ineffectiveness is directly recognized as gain or loss in current period.*
- b. *The effective portion arising from gain or loss of derivative contracts, designated as a cash flow hedge instruments is reported as other comprehensive income. The hedge ineffective portion is recognized as a gain or loss in the current period.*
- c. *Gain or loss arising from derivative contract that is designated as a net investment hedge in a foreign operation is reported as other comprehensive income, as long as the transactions are effectively recognized as hedge transactions.*
- d. *Gain or loss arising from derivative contract that is not designated as a hedging instrument (or derivative contract that does not qualify as a hedging instrument) is recognized as gain or loss in current period.*

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI
DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN**

Penyusunan laporan keuangan Bank mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontinjensi, pada akhir periode pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.

Pertimbangan

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Bank yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan Bank:

Usaha yang berkelanjutan

Manajemen Bank telah melakukan penilaian atas kemampuan Bank untuk melanjutkan kelangsungan usahanya dan berkeyakinan bahwa Bank memiliki sumber daya untuk melanjutkan usahanya di masa mendatang. Selain itu, manajemen Bank tidak mengetahui adanya ketidakpastian material yang dapat menimbulkan keraguan yang signifikan terhadap kemampuan Bank untuk melanjutkan usahanya. Oleh karena itu, laporan keuangan telah disusun atas dasar usaha yang berkelanjutan.

Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan

Bank menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan bila definisi yang ditetapkan PSAK No. 71, "Instrumen Keuangan" dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Bank seperti diungkapkan pada Catatan 2e.

**3. USE OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS**

The preparation of the Bank's financial statements requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities, and the disclosure of contingent liabilities, at the end of the reporting period. Uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that require a material adjustment to the carrying amounts of the asset and liability affected in future periods.

Judgments

The following judgments are made by management in the process of applying the Bank's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the Bank's Financial Statements:

Going concern

The Bank's management has made an assessment of the Bank's ability to continue as a going concern and is satisfied that the Bank has the resources to continue its business for the foreseeable future. Furthermore, the management is not aware of any material uncertainties that may cast significant doubt to the Bank's ability to continue as a going concern. Therefore, the financial statements continues to be prepared on the going concern basis.

Classification of financial assets and financial liabilities

The Bank determines the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the definition set forth in SFAS No. 71, "Financial Instrument". Accordingly, the financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the Bank's accounting policies disclosed in Note 2e.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI
DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

Pertimbangan (lanjutan)

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Bank yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan Bank: (lanjutan)

Nilai wajar instrumen keuangan

Semua aset dan liabilitas dimana nilai wajar diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan dapat dikategorikan pada level hirarki nilai wajar, berdasarkan tingkatan input terendah yang signifikan atas pengukuran nilai wajar secara keseluruhan:

- Level 1: harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses pada tanggal pengukuran.
- Level 2: input selain harga kuotasian yang termasuk dalam level 1 yang dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas, baik secara langsung atau tidak langsung.
- Level 3: input yang tidak dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas.

Aset keuangan yang tidak memiliki harga pasar

Bank mengklasifikasikan aset keuangan dengan mengevaluasi, antara lain, apakah nilai tersebut dikutip atau tidak di pasar aktif. Termasuk dalam evaluasi mengenai apakah aset keuangan dikutip di pasar aktif adalah penentuan apakah harga pasar dapat segera dan secara teratur tersedia, dan apakah mereka mewakili harga aktual dan teratur terjadi transaksi pasar secara *arms-length*.

Kontinjensi

Bank sedang terlibat dalam proses hukum. Perkiraan biaya kemungkinan bagi penyelesaian klaim telah dikembangkan melalui konsultasi dengan bantuan konsultan hukum Bank didasarkan pada analisis hasil yang potensial. Manajemen tidak berkeyakinan bahwa hasil dari hal ini akan mempengaruhi hasil usaha. Besar kemungkinan, bagaimanapun, bahwa hasil operasi di masa depan dapat secara material terpengaruh oleh perubahan dalam estimasi atau efektivitas dari strategi yang terkait dengan hal tersebut.

**3. USE OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS
(continued)**

Judgments (continued)

The following judgments are made by management in the process of applying the Bank's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the Bank's Financial Statements: (continued)

Fair value of financial instruments

All assets and liabilities in which fair value is measured or disclosed in the Financial Statements can be classified in fair value hierarchy levels, based on the lowest level of input that is significant to the overall fair value measurement:

- *Level 1: quoted prices (without adjustments) in active markets for identical assets or liabilities which are accessible at the measurement date.*
- *Level 2: inputs other than quoted prices included in level 1 that are observable for the assets and liabilities, either directly or indirectly.*
- *Level 3: inputs that are not observable for the assets and liabilities.*

Financial assets not quoted in an active market

The Bank classifies financial assets by evaluating, among others, whether the asset is quoted or not in an active market. Included in the evaluation on whether a financial asset is quoted in an active market is the determination on whether quoted prices are readily and regularly available, and whether those prices represent actual and regularly occurring market transactions on an arm's length basis.

Contingencies

The Bank is currently involved in legal proceedings. The estimate of the probable cost for the resolution of claims has been developed in consultation with the aid of the external legal counsel handling the Bank's defense in this matter and is based upon an analysis of potential results. Management does not believe that the outcome of this matter will affect the results of operations. It is probable, however, that future results of operations could be materially affected by changes in the estimates or in the effectiveness of the strategies relating to these proceedings.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI
DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

Pertimbangan (lanjutan)

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Bank yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan Bank: (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko untuk dapat menyebabkan penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya seperti yang diungkapkan di bawah ini. Bank mendasarkan asumsi dan estimasi yang digunakan pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun.

Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan dapat berubah akibat perubahan pasar atau situasi yang timbul di luar kendali Bank. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi yang digunakan pada saat terjadinya.

Cadangan kerugian penurunan nilai dari kredit dan pembiayaan/piutang syariah

Bank menelaah aset keuangan mereka pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain dan aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi berdasarkan PSAK No. 71 yang mengharuskan untuk mengakui kerugian kredit ekspektasian pada setiap tanggal pelaporan untuk mencerminkan perubahan risiko kredit dari aset keuangan tidak pada nilai wajar melalui laba rugi. PSAK No. 71 menggabungkan informasi *forward-looking* dan historis, terkini dan yang diperkirakan ke dalam estimasi kerugian kredit ekspektasian.

**3. USE OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS
(continued)**

Judgments (continued)

The following judgments are made by management in the process of applying the Bank's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the Bank's Financial Statements: (continued)

Estimates and Assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are disclosed below. The Bank based its assumptions and estimates on parameters available when the financial statements were prepared.

Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Bank. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

Allowance for impairment losses on loans and sharia financing/receivables

The Bank reviews their financial assets at fair value through other comprehensive income and financial assets at amortized cost under SFAS No. 71 which required to recognize the expected credit loss at each reporting date to reflect changes in credit risk of the financial assets not at fair value through profit or loss. SFAS No. 71 incorporates forward looking and historical, current and forecasted information into expected credit loss estimation

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI
DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Cadangan kerugian penurunan nilai dari kredit
dan pembiayaan/piutang syariah (lanjutan)

Dalam melakukan peninjauan penurunan nilai,
penilaian manajemen berikut diperlukan:

- i. Penentuan apakah aset mengalami
penurunan nilai berdasarkan indikator tertentu
seperti, antara lain, kesulitan keuangan
debitur, penurunan kualitas kredit; dan
- ii. Penentuan umur kredit ekspektasian yang
mencerminkan:
 - a. Jumlah yang tidak bias dan probabilitas
tertimbang yang ditentukan dengan
mengevaluasi kemungkinan dari berbagai
hasil;
 - b. Nilai waktu dari uang.

Penurunan nilai untuk surat berharga

Bank menentukan bahwa surat berharga memiliki
kriteria penurunan nilai yang sama dengan aset
keuangan yang dicatat pada biaya perolehan
diamortisasi.

Umur ekonomis dari aset tetap

Bank memperkirakan masa manfaat aset tetap
berdasarkan periode dimana aset diharapkan akan
tersedia untuk digunakan. Masa manfaat ekonomis
aset tetap ditinjau secara berkala dan diperbarui
jika memiliki ekspektasi yang berbeda dari
perkiraan sebelumnya, karena kerusakan secara
fisik dan teknis, atau keusangan secara komersial
dan legal atau batasan lainnya atas penggunaan
aset tersebut.

Selain hal tersebut, estimasi masa manfaat dari
aset tetap didasarkan pada penilaian secara
kolektif dengan menggunakan praktik industri,
teknik evaluasi internal dan pengalaman dengan
aset serupa.

Tetap dimungkinkan, bagaimanapun, bahwa hasil
masa depan dapat secara material dipengaruhi
oleh perubahan estimasi yang disebabkan oleh
perubahan faktor-faktor tersebut di atas.

Jumlah dan saat pencatatan biaya untuk setiap
periode akan dipengaruhi oleh perubahan dari
faktor dan keadaan saat pencatatan. Pengurangan
taksiran masa manfaat dari aset tetap akan
meningkatkan beban operasional yang diakui.

**3. USE OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS
(continued)**

Estimates and Assumptions (continued)

Allowance for impairment losses on loans and
sharia financing/receivables (continued)

In carrying out the impairment review, the following
management's judgements are required:

- i. Determination whether the assets is impaired
based on certain indicators such as, amongst
others, financial difficulties of the debtor's,
deterioration of the credit quality of the
debtor's; and
- ii. Determination of expected credit life that
reflect:
 - a. An unbiased and probability-weighted
amount that is determined by evaluating
a range of possible outcomes;
 - b. The time value of money.

Impairment of securities

The Bank determines that securities are impaired
based on the same criteria as financial assets
carried at amortized cost.

Useful lives of premises and equipment

The Bank estimates the useful lives of premises
and equipment based on the period over which the
assets are expected to be available-for-use. The
estimated useful lives of premises and equipment
are reviewed periodically and are updated if
expectations differ from previous estimates due to
physical wear and tear, technical or commercial
obsolescence and legal or other limits on the use of
the assets.

In addition, estimation of the useful lives of
premises and equipment is based on collective
assessment of industry practice, internal technical
evaluation and experience with similar assets.

It is possible, however, that future results of
operations could be materially affected by changes
in estimates brought about by changes in factors
mentioned above.

The amounts and timing of recorded expenses for
any period would be affected by changes in these
factors and circumstances. The reduction in the
estimated useful lives of premises and equipment
would increase the recorded operating expenses.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI
DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Jangka waktu sewa

Bank menentukan jangka waktu sewa sebagai jangka waktu sewa yang tidak dapat dibatalkan, bersama dengan periode yang dicakup oleh opsi untuk memperpanjang masa sewa jika dipastikan akan dilaksanakan, atau periode apa pun yang dicakup oleh opsi untuk menghentikan sewa, jika cukup wajar untuk tidak dilakukan.

Bank memiliki beberapa kontrak sewa yang mencakup opsi perpanjangan dan penghentian jangka waktu sewa. Bank menerapkan penilaian dalam mengevaluasi apakah dapat dipastikan jika akan menggunakan opsi untuk memperpanjang atau menghentikan sewa. Hal tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan seluruh fakta dan keadaan yang relevan yang memberikan insentif ekonomi untuk melakukan perpanjangan atau penghentian sewa. Setelah tanggal dimulainya, Bank menilai kembali masa sewa, jika terdapat peristiwa atau perubahan signifikan dalam keadaan yang berada dalam kendali dan mempengaruhi apakah Bank cukup pasti untuk mengeksekusi opsi memperpanjang atau menghentikan sewa.

Penurunan nilai aset non-keuangan

Bank mengevaluasi penurunan nilai aset non-keuangan apabila terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat aset non-keuangan tidak dapat dipulihkan kembali.

Faktor-faktor penting yang dapat menyebabkan penelaahan penurunan nilai adalah sebagai berikut:

- Kinerja yang rendah secara signifikan jika dibandingkan dengan ekspektasi dari hasil operasi historis maupun proyeksi hasil operasi di masa yang akan datang;
- perubahan yang signifikan dalam cara penggunaan aset atau strategi bisnis secara keseluruhan; dan
- Industri atau tren ekonomi yang secara signifikan bernilai negatif.

Bank mengakui kerugian penurunan nilai apabila nilai tercatat aset melebihi nilai yang dapat dipulihkan.

**3. USE OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS
(continued)**

Estimates and Assumptions (continued)

The lease term

The Bank determines the lease term as a non cancellable lease term, along with the period covered by the option to extend the lease if it is reasonably exercised, or any period covered by the option to terminated the lease, if it is reasonable not to exercise.

The Bank has several leases that include extention option and termination of lease term. Bank implements the assessment in evaluating whether it ensure to exercise the extention or termination option of lease. This done by taking into consideration of all relevant facts and circumstances that provide economic incentives for the extention or termination of the lease. After the commencement date, the Bank assesses the lease term, if there is an event or significant change in circumstances that are in control and affects whether the Bank is reasonable to exercise the extention or termination option of the lease.

Impairment of non-financial assets

The Bank assesses impairment of non-financial assets whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying amount of non-financial asset may not be recoverable.

The factors that the Bank considers important which could trigger an impairment review include the following:

- significant underperformance relative to expected historical or projected future operating results;
- significant changes in the manner of use of the acquired assets or the strategy for overall business; and
- significant negative industry or economic trends.

The Bank recognizes an impairment loss whenever the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI
DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN
(lanjutan)**

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Jumlah terpulihkan adalah nilai yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurang biaya pelepasan dengan nilai pakai aset (atau unit penghasil kas). Jumlah terpulihkan diestimasi untuk aset individual atau, jika tidak memungkinkan, untuk unit penghasil kas yang mana aset tersebut merupakan bagian daripada unit tersebut.

Pengakuan aset pajak tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh saldo rugi fiskal yang belum digunakan sejauh terdapat kemungkinan bahwa saldo rugi tersebut dapat dikompensasikan terhadap penghasilan kena pajak di masa yang akan datang.

Pertimbangan manajemen yang signifikan diperlukan untuk menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui, sesuai dengan saat dan jumlah penghasilan kena pajak di masa mendatang seiring dengan strategi perencanaan pajak.

Bank menelaah aset pajak tangguhan pada setiap tanggal laporan posisi keuangan dan mengurangi jumlah tercatat dalam hal tidak adanya lagi kemungkinan bahwa penghasilan kena pajak yang cukup akan tersedia untuk mengkompensasi sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan.

Pertimbangan signifikan diperlukan dalam menentukan provisi perpajakan

Bank menentukan provisi perpajakan berdasarkan estimasi atas kemungkinan adanya tambahan beban pajak. Jika hasil akhir dari hal ini berbeda dengan jumlah yang dicatat semula, maka perbedaan tersebut akan berdampak terhadap laba/rugi.

Nilai kini atas kewajiban pensiun

Biaya atas program pensiun dan imbalan pasca kerja lainnya ditentukan dengan perhitungan aktuaris.

Perhitungan aktuaris melibatkan penggunaan asumsi mengenai tingkat diskonto, tingkat pengembalian yang diharapkan dari aset, kenaikan gaji di masa depan, tingkat kematian dan tingkat kecacatan. Karena program tersebut memiliki sifat jangka panjang, maka perkiraan tersebut memiliki ketidakpastian yang signifikan.

**3. USE OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS
(continued)**

Estimates and Assumptions (continued)

The recoverable amount is the higher of an asset's (or Cash Generating Unit's) fair value less costs of disposals and its value in use. Recoverable amounts are estimated for individual assets or, if it is not possible, for the Cash Generating Unit to which the asset belongs.

Recognition of deferred tax assets

Deferred tax assets are recognized for all unused tax losses and credits to the extent that it is probable that taxable income will be available against which the losses can be utilized.

Significant management judgment is required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognized, based upon the likely timing and level of future taxable income together with future tax planning strategies.

The Bank reviews its deferred tax assets at each statement of financial position date and reduces the carrying amount to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable income will be available to allow all or part of the deferred tax assets to be utilized.

Significant judgement is required in determining the provision for taxes

The Bank provides for tax provision based on estimates whether the additional taxes will be due. Where the final tax outcome of these matters is different from the amounts that were initially recorded, such differences will impact the profit/loss.

Present value of retirement obligation

The cost of defined retirement pension plan and other post employment benefits is determined using actuarial valuations.

The actuarial valuation involves making assumptions about discount rates, expected rates of return on assets, future salary increases, mortality rates and disability rate. Due to the long-term nature of these plans, such estimates are subject to significant uncertainty.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

4. KAS

	31 Desember/ December 31, 2023	
	Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount in foreign currencies (angka penuh/ full amount)	Ekuivalen/ Equivalent Rupiah
Rupiah		2.095.378
Mata uang asing		
Dolar Amerika Serikat	1.183.419	18.221
Dolar Singapura	598.715	6.991
Dolar Australia	279.700	2.943
Euro Eropa	94.220	1.605
Pound Sterling Inggris	41.035	805
Yen Jepang	5.497.000	598
Dolar Hong Kong	188.570	372
Ringgit Malaysia	90.389	303
Riyal Arab Saudi	34.040	140
Renminbi	61.204	133
		32.111
Total		2.127.489

Saldo dalam mata uang Rupiah termasuk uang pada Anjungan Tunai Mandiri (ATM) sebesar Rp311.154 dan Rp270.091, masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

5. GIRO PADA BANK INDONESIA

	31 Desember/ December 31, 2023	
	Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount in foreign currencies (angka penuh/ full amount)	Ekuivalen/ Equivalent Rupiah
Rupiah		17.607.788
Mata uang asing		
Dolar Amerika Serikat	34.940.135	537.973
Total		18.145.761

Dalam giro pada Bank Indonesia termasuk giro yang didasarkan pada prinsip perbankan syariah sebesar Rp3.290.216 dan Rp3.381.362 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

4. CASH

	31 Desember/ December 31, 2022		
	Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount in foreign currencies (angka penuh/ full amount)	Ekuivalen/ Equivalent Rupiah	
Rupiah		1.645.841	Rupiah
Mata uang asing			Foreign currencies
Dolar Amerika Serikat	711.837	11.081	United States Dollar
Dolar Singapura	193.883	2.248	Singapore Dollar
Dolar Australia	99.490	1.050	Australian Dollar
Euro Eropa	34.410	570	European Euro
Pound Sterling Inggris	2.350	44	Great Britain Pound Sterling
Yen Jepang	1.310.000	154	Japanese Yen
Dolar Hong Kong	46.550	97	Hong Kong Dollar
Ringgit Malaysia	87.453	309	Malaysian Ringgit
Riyal Arab Saudi	19.573	81	Saudi Arabian Riyal
Renminbi	26.102	58	Renminbi
		15.692	
Total		1.661.533	Total

The Rupiah balance includes cash in ATMs (Automated Teller Machines) of Rp311,154 and Rp270,091, as of December 31, 2023 and 2022, respectively.

5. CURRENT ACCOUNTS WITH BANK INDONESIA

	31 Desember/ December 31, 2022		
	Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount in foreign currencies (angka penuh/ full amount)	Ekuivalen/ Equivalent Rupiah	
Rupiah		25.192.737	Rupiah
Mata uang asing			Foreign currency
Dolar Amerika Serikat	14.402.083	224.204	United States Dollar
Total		25.416.941	Total

Current accounts with Bank Indonesia include current accounts based on sharia banking principles amounting to Rp3,290,216 and Rp3,381,362 as of December 31, 2023 and 2022, respectively.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

5. GIRO PADA BANK INDONESIA (lanjutan)

Rasio GWM Bank pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022
<u>Konvensional</u>		
Rupiah		
Utama	6,04%	8,28%
Harian	0,24%	0,18%
Rata-rata	5,80%	8,10%
PLM	9,66%	16,17%
Dolar Amerika Serikat	4,40%	4,13%
<u>Syariah</u>		
Rupiah	6,10%	7,76%

Saldo giro pada Bank Indonesia disediakan untuk memenuhi persyaratan Giro Wajib Minimum (GWM) dari Bank Indonesia.

Rasio GWM pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dihitung berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 20/3/PBI/2018 tanggal 29 Maret 2018 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PBI No. 24/4/PBI/2022 tanggal 25 Februari 2022. PBI tersebut dijelaskan oleh Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No. 20/10/PADG/2018 tanggal 31 Mei 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan PADG No.20/30/PADG/2018 tanggal 30 November 2018, PADG No. 21/14/PADG/2019 tanggal 26 Juni 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan PADG No. 21/27/PADG/2019 tanggal 26 Desember 2019, PADG No. 22/2/PADG/2020 tanggal 13 Maret 2020, PADG No. 22/10/PADG/2020 tanggal 30 April 2020, PADG No. 22/19/PADG/2020 tanggal 29 Juli 2020, PADG No.23/27/PADG/2021 tanggal 21 Desember 2021, PADG No. 24/3/PADG/2022 tanggal 1 Maret 2022, PADG No. 24/8/PADG/2022 tanggal 30 Juni 2022, PADG No. 2 Tahun 2023 tanggal 24 Maret 2023 dan perubahan terakhir pada PADG No. 12 Tahun 2023 tanggal 1 Oktober 2023 tentang "Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah".

5. CURRENT ACCOUNTS WITH BANK INDONESIA (continued)

The minimum reserve requirement ratios of the Bank as of December 31, 2023 and 2022, are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022
<u>Conventional</u>		
Rupiah		
Primary	8,28%	16,17%
Daily	0,18%	8,10%
Average	5,80%	8,10%
PLM	9,66%	16,17%
United States Dollar	4,40%	4,13%
<u>Sharia</u>		
Rupiah	6,10%	7,76%

Current accounts with Bank Indonesia are maintained to comply with Bank Indonesia's Minimum Legal Reserve Requirements (GWM).

The calculation of the GWM ratios as of December 31, 2023 and 2022 is based on Bank Indonesia regulation (PBI) No. 20/3/PBI/2018 dated March 29, 2018, which has been amended several times, the latest with PBI No. 24/4/PBI/2022 dated February 25, 2022. The PBI is explained by Regulations of Members of the Board of Governors (PADG) No. 20/10/PADG/2018 dated May 31, 2018 which has been amended several times with PADG No. 20/30/PADG/2018 dated November 30, 2018, PADG No. 21/14/PADG/2019 dated June 26, 2019 which has been amended several times with PADG No. 21/27/PADG/2019 dated December 26, 2019, PADG No. 22/2/PADG/2020 dated March 13 2020, PADG No. 22/10/PADG/2020 dated April 30, 2020, PADG No. 22/19/PADG/2020 dated July 29, 2020, PADG No.23/27/PADG/2021 dated December 21, 2021, PADG No. 24/3/PADG/2022 dated March 1, 2022, PADG No. 24/8/PADG/2022 dated June 30, 2022, PADG No. 2 year of 2023 dated March 24, 2023 and the latest amendment by PADG No.12 year of 2023 dated October 1, 2023 regarding "Minimum Statutory Reserve Requirements in Rupiah and Foreign Currencies of Conventional Commercial Banking, Sharia Commercial Banking and Sharia Business Units".

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

5. GIRO PADA BANK INDONESIA (lanjutan)

Bank Indonesia melakukan penguatan kebijakan insentif untuk mendorong peranan perbankan dalam pembiayaan kepada sektor prioritas sesuai Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 24/5/PBI/2022 tentang Insentif bagi Bank yang Memberikan Penyediaan Dana untuk Kegiatan Ekonomi Tertentu dan Inklusif tanggal 25 Februari 2022, sebagaimana diatur lebih lanjut melalui PADG No. 24/4/PADG/2022 tanggal 1 Maret 2022 sebagaimana telah diubah dengan perubahan terakhir PADG No. 1 Tahun 2023 tanggal 15 Februari 2023 dan perubahan terakhir PADG No. 11 tahun 2023 tanggal 27 September 2023 tentang "Peraturan Pelaksanaan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial" Bank Indonesia memberikan insentif berupa kelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah yang wajib dipenuhi secara harian sebesar 3,20% (tiga koma dua persen) dan kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah berdasarkan prinsip syariah sebesar 2,50% (dua koma lima persen). Insentif bagi Bank yang melakukan penyediaan dana untuk kegiatan ekonomi tertentu dan inklusif ditetapkan oleh Bank Indonesia dan berlaku mulai 1 Desember 2023 sampai dengan 29 Februari 2024.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tersebut di atas, Bank harus memenuhi persyaratan GWM Utama dalam Rupiah masing-masing sebesar 5,80% dan 8,10%, sedangkan untuk mata uang asing masing-masing sebesar 4,00% dan 4,00%. Untuk PLM adalah sebesar 5,00% dan 6,00% dalam Rupiah pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tersebut berdasarkan prinsip syariah Bank harus memenuhi persyaratan GWM dalam Rupiah masing-masing sebesar 5,00% dan 7,50%. Untuk mata uang asing masing-masing sebesar 1,00% dan 1,00%.

**5. CURRENT ACCOUNTS WITH BANK INDONESIA
(continued)**

Bank Indonesia has strengthened incentive policy to stimulate the role of banks in financing priority sectors in accordance with Bank Indonesia Regulation (PBI) No. 24/5/PBI/2022 regarding Incentives for Banks Providing Funds for Certain and Inclusive Economic Activities dated February 25, 2022, as further regulated through PADG No. 24/4/PADG/2022 dated March 1, 2022 as amended by the latest amendment of PADG No. 1 of 2023 dated February 15, 2023, and the latest amendment by PADG No. 11 year of 2023 dated September 27, 2023 regarding "Regulations for Implementing Macroprudential Liquidity Incentive Policy" Bank Indonesia provides incentives in the form of leniency on the obligation to fulfill the statutory reserve in rupiah which must be fulfilled on a daily basis of 3.20% (three point two percent) and the obligation to fulfill the statutory reserve in rupiah based on sharia principles is 2.50% (two point five percent). This incentive is given to Banks that provide funds for certain and inclusive economic activities as stipulated by Bank Indonesia and are valid from December 1, 2023 to February 29, 2024.

As of December 31, 2023 and 2022, based on the above Bank Indonesia regulations, the Bank is required to maintain primary GWM in Rupiah amounting to 5.80% and 8.10%, respectively, while GWM for foreign currency amounting to 4.00% and 4.00%, respectively. PLM amounting to 5.00% and 6.00% in Rupiah as of December 31, 2023 and 2022.

As of December 31, 2023 and 2022, based on the Bank Indonesia regulations, for sharia principle, The Bank is required to maintain GWM in Rupiah of 5.00% and 7.50%. For foreign currencies of 1.00% and 1.00%, respectively.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

5. GIRO PADA BANK INDONESIA (lanjutan)

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Bank juga harus memenuhi Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 20/4/PBI/2018 tanggal 29 Maret 2018 tentang "Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah" sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 21/12/PBI/2019 tanggal 25 November 2019, PBI No. 22/17/PBI/2020 tanggal 30 September 2020, dan PBI No. 24/16/PBI/2022 tanggal 1 November 2022 yang dijelaskan melalui Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 21/22/PADG/2019 tanggal 28 November 2019 yang telah diubah dengan PADG No. 21/11/PADG/2020 tanggal 29 April 2020, PADG 22/30/PADG/2020 tanggal 5 Oktober 2020, PADG No. 23/7/PADG/2021 tanggal 26 April 2021, PADG No. 23/31/PADG/2021 tanggal 31 Desember 2021 dan perubahan terakhir PADG No. 24/14/PADG/2022 tanggal 1 November 2022 tentang "Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah".

GWM Primer adalah simpanan minimum yang wajib dipelihara oleh Bank dalam bentuk saldo Rekening Giro pada Bank Indonesia. GWM Sekunder dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) adalah cadangan minimum yang wajib dipelihara oleh Bank berupa Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Utang Negara (SUN), Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan/atau excess reserve yang merupakan kelebihan saldo Rekening Giro Rupiah Bank dari GWM Primer, GWM LFR dan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM). GWM LFR dan RIM adalah tambahan simpanan minimum yang wajib dipelihara oleh Bank dalam bentuk saldo Rekening Giro pada Bank Indonesia, jika LFR dan RIM target Bank Indonesia (84%) atau jika di atas maksimum LFR dan RIM target BI (94%) dan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) Bank lebih kecil dari KPM Insentif BI sebesar 14%.

Bank telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia tentang Giro Wajib Minimum pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

Sisa umur jatuh tempo atas giro pada Bank Indonesia dikategorikan sebagai kurang dari satu bulan (Catatan 46).

5. CURRENT ACCOUNTS WITH BANK INDONESIA (continued)

As of December 31, 2023 and 2022, The Bank must also comply with Bank Indonesia Regulation (PBI) No. 20/4/PBI/2018 dated March 29, 2018 regarding "Macroprudential Intermediation Ratios and Macroprudential Liquidity Buffers for Conventional Commercial Banks, Sharia Commercial Banks, and Sharia Business Unit" which has been amended with PBI 21/12/PBI/2019 dated November 25, 2019, PBI No. 22/17/PBI/2020 dated September 30, 2020 and PBI 24/16/PBI/2022 dated November 1, 2022, which is explained through PADG No. 21/22/PADG/2019 dated November 28, 2019 which has been amended with PADG No. 21/11/PADG/2020 dated April 29, 2020, PADG No. 22/30/PADG/2020 dated October 5, 2020, PADG No. 23/7/PADG/2021 dated April 26, 2021, PADG No. 23/31/PADG/2021 dated December 31, 2021 and the latest amendment by PADG 24/14/PADG/2022 dated November 1, 2022 concerning "Macroprudential Intermediation Ratio and Macroprudential Liquidity Buffer for Conventional Commercial Banks, Sharia Commercial Banks, and Sharia Business Units".

Primary Minimum Statutory Reserve is a minimum reserve that should be maintained by the Bank in Current Accounts with Bank Indonesia. Secondary Minimum Statutory Reserve and Macroprudential Liquidity Buffer are the minimum reserves that should be maintained by the Bank which comprise of Certificates of Bank Indonesia (SBI), Government Debenture Debt (SUN), Sharia Government Securities (SBSN), and/or excess reserve which represents the excess reserve of the Bank's Current Accounts in Rupiah over the Primary Minimum Statutory Reserve, Minimum Statutory Reserve on LFR and Macroprudential Intermediation Ratio (RIM). Minimum Statutory Reserve on LFR and RIM is the additional reserve that should be maintained by the Bank in the form of Current Accounts with Bank Indonesia, if the Bank's LFR and RIM is below the minimum of LFR and RIM targeted by Bank Indonesia (84%) or if the Bank's LFR and RIM is above the maximum of LFR and RIM targeted by BI (94%) and the Capital Adequacy Ratio (CAR) is below BI requirement of 14%.

The Bank has complied with Bank Indonesia regulations concerning the minimum reserve requirements as of December 31, 2023 and 2022.

The remaining period of current accounts with Bank Indonesia is categorized as less than one month (Note 46).

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

6. GIRO PADA BANK LAIN

a. Berdasarkan mata uang

	31 Desember/ December 31, 2023		31 Desember/ December 31, 2022	
	Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount in foreign currencies (angka penuh/ full amount)	Ekuivalen/ Equivalent Rupiah	Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount in foreign currencies (angka penuh/ full amount)	Ekuivalen/ Equivalent Rupiah
Rupiah		234.046		540.052
Mata uang asing				
Yen Jepang	7.806.707.206	849.955	3.825.323.896	450.661
Dolar Amerika Serikat	48.194.949	742.058	19.465.688	304.746
Australia Dollar	16.604.307	174.690	4.480.725	47.307
Pound Sterling Inggris	4.344.397	85.266	3.372.747	63.361
Euro Eropa	4.801.220	81.805	104.380	30.893
Singapura Dollar	2.758.939	32.214	2.950.598	34.206
Renminbi	1.550.357	3.364	460.499	1.031
		1.969.352		932.205
Total		2.203.398		1.472.257
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai		(1.804)		(1.747)
Neto		2.201.594		1.470.510

b. Berdasarkan bank

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022
<u>Rupiah</u>		
<u>Pihak Ketiga</u>		
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	189.189	215.125
PT Bank Central Asia Tbk	32.948	263.538
Standard Chartered Bank, Jakarta	10.179	46.579
Citibank N.A., Jakarta	925	925
Lainnya	357	337
	233.598	526.504
<u>Pihak Berelasi (Catatan 43)</u>		
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	200	1.198
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	183	-
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	52	12.350
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	13	-
	448	13.548

6. CURRENT ACCOUNTS WITH OTHER BANKS

a. By currency

Rupiah	
Foreign currencies	
Japanese Yen	
United States Dollar	
Australian Dollar	
Great Britain Pound Sterling	
European Euro	
Singapore Dollar	
Renminbi	
Total	
Less allowance for impairment losses	
Net	

b. By bank

<u>Rupiah</u>	
<u>Third Parties</u>	
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	
PT Bank Central Asia Tbk	
Standard Chartered Bank, Jakarta	
Citibank N.A., Jakarta	
Others	
<u>Related Parties (Note 43)</u>	
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

6. GIRO PADA BANK LAIN (lanjutan)

6. CURRENT ACCOUNTS WITH OTHER BANKS (continued)

b. Berdasarkan bank (lanjutan)

b. By bank (continued)

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022
<u>Mata uang asing</u>		
<u>Pihak Ketiga</u>		
Standard Chartered Bank	600.159	325.746
PT Bank ANZ Indonesia	174.690	47.307
PT Bank Central Asia Tbk	108.146	27.410
PT Bank DBS Indonesia	32.214	34.206
PT Bank ICBC Indonesia	3.364	1.031
Indonesische Overzeese Bank N.V., Amsterdam	1.778	1.731
	<u>920.351</u>	<u>437.431</u>
<u>Pihak Berelasi (Catatan 43)</u>		
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	901.410	457.512
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	147.591	37.262
	<u>1.049.001</u>	<u>494.774</u>
Total	2.203.398	1.472.257
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(1.804)	(1.747)
Neto	2.201.594	1.470.510

<u>Foreign currencies</u>
<u>Third Parties</u>
Standard Chartered Bank
PT Bank ANZ Indonesia
PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank DBS Indonesia
PT Bank ICBC Indonesia
Indonesische Overzeese Bank N.V., Amsterdam

<u>Related Parties (Note 43)</u>
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Total
Less allowance
for impairment losses

Net

Dalam giro pada bank lain termasuk giro yang didasarkan pada prinsip perbankan syariah sebesar Rp200 dan Rp1.198, masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

Current accounts with other banks include current accounts based on sharia banking principles amounting to Rp200 and Rp1,198, as of December 31, 2023 and 2022, respectively.

Berikut adalah perubahan giro pada bank lain dengan klasifikasi biaya perolehan diamortisasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022:

Presented below is the movements in amortized cost of current account with other banks for the years ended as of December 31, 2023 and 2022, respectively:

	31 Desember/December 31, 2023					
	Stage 1	Stage 2	Stage 3	Syariah ^{*)}	Total	
Giro pada Bank Lain						Current Accounts with Other Banks
Saldo awal	1.469.328	-	1.731	1.198	1.472.257	Beginning balance
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	732.092	-	47	(998)	731.141	Net remeasurement of carrying amount
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	-	-	-	-	-	New financial assets originated or purchased
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	-	-	-	-	-	Derecognized financial assets
Saldo akhir tahun	2.201.420	-	1.778	200	2.203.398	Balance at the end of year

*) Tidak menerapkan PSAK No. 71 "Instrumen Keuangan"

*) Not applying SFAS No. 71 "Financial Instruments"

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

6. GIRO PADA BANK LAIN (lanjutan)

b. Berdasarkan bank (lanjutan)

Berikut adalah perubahan giro pada bank lain dengan klasifikasi biaya perolehan diamortisasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (lanjutan):

	31 Desember/December 31, 2022				
	Stage 1	Stage 2	Stage 3	Syariah ^{*)}	Total
Giro pada Bank Lain					
Saldo awal	1.094.220	-	1.682	896	1.096.798
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	358.406	-	49	302	358.757
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	16.702	-	-	-	16.702
Saldo akhir tahun	1.469.328	-	1.731	1.198	1.472.257

Current Accounts with Other Banks
Beginning balance
Net remeasurement of carrying amount
New financial assets originated or purchased
Balance at the end of year

^{*)} Tidak menerapkan PSAK No. 71 "Instrumen Keuangan"

^{*)} Not applying SFAS No. 71 "Financial Instruments"

c. Tingkat suku bunga rata-rata per tahun untuk giro pada bank lain adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022
Rupiah	0,69%	0,19%
Mata uang asing	0,00%	0,00%

c. *Average annual interest rates for current accounts with other banks are as follows:*

Rupiah
Foreign currencies

d. Kolektibilitas

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, kolektibilitas giro pada bank lain adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022
Lancar	2.201.620	1.470.526
Macet	1.778	1.731
Total	2.203.398	1.472.257
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(1.804)	(1.747)
Neto	2.201.594	1.470.510

d. *Collectibility*

As of December 31, 2023 and 2022, the collectibility of current accounts with other banks are as follows:

Current
Loss

Total
Less allowance for impairment losses
Net

e. Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, tidak terdapat saldo giro pada bank lain yang digunakan sebagai agunan.

e. *As of December 31, 2023 and 2022, there are no current accounts with other banks which are pledged as collateral.*

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

6. GIRO PADA BANK LAIN (lanjutan)

- f. Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai giro pada bank lain adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
Saldo awal tahun	1.747	1.698	Balance at beginning of year
Penyisihan (pemulihan) kerugian penurunan selama tahun berjalan (Catatan 33)	57	49	Provision (reversal) for impairment losses during the year (Note 33)
Saldo akhir tahun	1.804	1.747	Balance at the end of year

*) Termasuk selisih kurs karena penjabaran mata uang asing

*) Including exchange difference on translation of foreign currency

	31 Desember/December 31, 2023					
	Stage 1	Stage 2	Stage 3	Syariah ^{*)}	Total	
Giro pada Bank Lain						Current Accounts with Other Banks
Saldo awal	14	-	1.731	2	1.747	Beginning balance
Pengukuran kembali bersih penurunan nilai	10		47	-	57	Net remeasurement of impairment losses
Saldo akhir tahun	24	-	1.778	2	1.804	Balance at the end of year

*) Tidak menerapkan PSAK No. 71 "Instrumen Keuangan"

*) Not applying SFAS No. 71 "Financial Instruments"

	31 Desember/December 31, 2022					
	Stage 1	Stage 2	Stage 3	Syariah ^{*)}	Total	
Giro pada Bank Lain						Current Accounts with Other Banks
Saldo awal	14	-	1.682	2	1.698	Beginning balance
Pengukuran kembali bersih penurunan nilai	-	-	49	-	49	Net remeasurement of impairment losses
Saldo akhir tahun	14	-	1.731	2	1.747	Balance at the end of year

*) Tidak menerapkan PSAK No. 71 "Instrumen Keuangan"

*) Not applying SFAS No. 71 "Financial Instruments"

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian atas giro pada bank lain yang dibentuk telah memadai.

The management believes that the allowance for impairment losses provided on current accounts with other banks is adequate.

- g. Informasi mengenai klasifikasi aset keuangan yang mengalami penurunan nilai dan tidak mengalami penurunan nilai diungkapkan pada Catatan 46.

- g. Information with respect to classification of impaired and not impaired of financial assets are disclosed in Note 46.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

7. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN

7. PLACEMENTS WITH BANK INDONESIA AND OTHER BANKS

a. Berdasarkan mata uang dan jenis

a. Based on currency and type

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022
<u>Rupiah</u>		
<u>Pihak Ketiga</u>		
Deposit Facility Bank Indonesia	8.998.689	2.499.670
Deposit Facility Syariah		
Bank Indonesia	3.150.000	2.078.000
Inter-bank call Money		
Term Deposit Bank Indonesia	-	7.998.224
PT Bank Pembangunan Daerah		
Jawa Timur Tbk	-	400.000
	12.148.689	12.975.894
<u>Pihak Berelasi (Catatan 43)</u>		
Tabungan		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	61	61
	61	61
<u>Mata uang asing</u>		
<u>Pihak Ketiga</u>		
Term Deposit Bank Indonesia	18.412.372	-
	18.412.372	-
Total	30.561.122	12.975.955

<u>Rupiah</u>	
<u>Third Parties</u>	
Deposit Facility Bank Indonesia	
Deposit Facility Sharia	
Bank Indonesia	
Inter-bank call Money	
Term Deposit Bank Indonesia	
PT Bank Pembangunan Daerah	
Jawa Timur Tbk	
<u>Related Party (Note 43)</u>	
Savings Deposits	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	

<u>Foreign currencies</u>	
<u>Third Parties</u>	
Term Deposit Bank Indonesia	

Dalam penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain termasuk penempatan yang didasarkan pada prinsip perbankan syariah sebesar Rp3.150.000 dan Rp2.078.000, masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

As of December 31, 2023 and 2022, placements with Bank Indonesia and other banks include placements based on sharia banking principles amounting to Rp3,150,000 and Rp2,078,000, respectively.

b. Berdasarkan sisa umur hingga jatuh tempo

b. Based on remaining period until maturity

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022
≤ 1 bulan	30.561.122	12.975.955
Total	30.561.122	12.975.955

≤ 1 month

Total

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

7. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA DAN BANK LAIN (lanjutan)

- c. Tingkat suku bunga rata-rata per tahun untuk penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain:

	31 Desember/ December 31, 2023
Rupiah	5,23%
Mata Uang Asing	5,24%

- d. Seluruh penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 diklasifikasikan sebagai lancar.

- e. Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai tidak diperlukan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, karena manajemen berkeyakinan bahwa penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain dapat ditagih.

- f. Informasi mengenai klasifikasi aset keuangan yang mengalami penurunan nilai dan tidak mengalami penurunan nilai diungkapkan pada Catatan 46.

8. EFEK-EFEK

- a. Berdasarkan tujuan, pihak berelasi dan pihak ketiga

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022
<u>Pihak Ketiga</u>		
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	1.042.013	793.831
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	406.144	-
Diukur pada biaya perolehan di amortisasi	6.611	79.278
	1.454.768	873.109

Pihak Berelasi (Catatan 43)

Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	1.522.192	655.293
Diukur pada biaya perolehan di amortisasi	2.328.913	194.766
	3.851.105	850.059
Total	5.305.873	1.723.168
Cadangan kerugian penurunan nilai	(22.903)	(2.399)
Neto	5.282.970	1.720.769

7. PLACEMENTS WITH BANK INDONESIA AND OTHER BANKS (continued)

- c. Average annual interest rates for placement with Bank Indonesia and other banks:

	Rupiah
	Foreign Currencies

- d. All placements with other banks and Bank Indonesia as of December 31, 2023 and 2022, are classified as current.

- e. Management believes no allowance for impairment losses is required as of December 31, 2023 and 2022, because management believes that placements with Bank Indonesia and other banks are fully collectible.

- f. Information with respect to classification of impaired and not impaired of financial assets are disclosed in Note 46.

8. SECURITIES

- a. Based on purpose, related party and third party

<u>Third Parties</u>
Fair value through profit or loss
Fair value through other comprehensive income
Amortized cost

Related Party (Note 43)

Fair value through other comprehensive income
Amortized cost

Allowance for impairment losses

Net

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

8. EFEK-EFEK (lanjutan)

b. Berdasarkan mata uang, jenis dan penerbit

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022
<u>Nilai wajar melalui laba rugi</u>		
<u>Rupiah</u>		
<u>Pihak Ketiga</u>		
Reksadana		
PT Syailendra Capital	-	100.486
PT Berdikari Manajemen		
Investasi	-	100.470
PT Batavia Prosperindo		
Aset Manajemen	-	100.460
Sekuritas Dollar Amerika Serikat		
Bank Indonesia	307.510	-
Sekuritas Rupiah		
Bank Indonesia	194.060	-
Efek Beragun Aset		
KIK - SP - BTN 05		
Kelas B	161.407	176.898
EBA - SP - BTN04		
Kelas B	88.598	95.685
EBA - SP - BTN08		
Kelas B	75.307	-
EBA - SP - BTN02		
Kelas B	59.833	50.520
KIK - SP - BTN 07		
Kelas B	54.409	52.238
EBA - SP - BTN06		
Kelas B	51.667	64.494
EBA - SP - BTN03		
Kelas B	49.222	52.580
	1.042.013	793.831

Aset keuangan yang diukur pada
nilai wajar melalui penghasilan
komprehensif lain

<u>Rupiah</u>	
<u>Pihak Ketiga</u>	
Reksadana Terproteksi	
PT Batavia Prosperindo Aset	
Manajemen	
BATAVIA MAX 51	203.822
PT Manulife Aset Manajemen	
Indonesia	
MANULIFE PDU V	202.322
	406.144

Pihak Berelasi (Catatan 43)

Obligasi		
PT Perusahaan Listrik Negara		
(Persero)		
Sukuk Tahap II Seri B 2017	51.125	52.424
PT Waskita Karya (Persero) Tbk		
Tahap IV Seri A 2022	49.935	48.672
PT Pegadaian		
Sukuk Mudharabah IV 2021	30.000	30.603
Sukuk Mudharabah II 2022	27.745	28.028

8. SECURITIES (continued)

b. Based on currency, type and issuer

<u>Fair value through profit or loss</u>	
<u>Rupiah</u>	
<u>Third Parties</u>	
<u>Mutual Funds</u>	
PT Syailendra Capital	
PT Berdikari Manajemen	
Investasi	
PT Batavia Prosperindo	
Aset Manajemen	
United States Dollar Securities	
Bank Indonesia	
Rupiah Securities	
Bank Indonesia	
Asset Backed Securities	
KIK EBA - SP - BTN 05	
Class B	
EBA - SP - BTN04	
Class B	
EBA - SP - BTN08	
Class B	
EBA - SP - BTN02	
Class B	
KIK EBA - SP - BTN 07	
Class B	
EBA - SP - BTN06	
Class B	
EBA - SP - BTN03	
Class B	

Financial asset held at fair
value through other
comprehensive income

<u>Rupiah</u>	
<u>Third Parties</u>	
<u>Protected Mutual Funds</u>	
PT Batavia Prosperindo Aset	
Manajemen	
BATAVIA MAX 51	
PT Manulife Aset Manajemen	
Indonesia	
MANULIFE PDU V	

Related Parties (Note 43)

<u>Bonds</u>	
PT Perusahaan Listrik Negara	
(Persero)	
Sukuk Phase II Series B 2017	
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	
Phase IV Series A 2022	
PT Pegadaian	
Sukuk Mudharabah IV 2021	
Sukuk Mudharabah II 2022	

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

8. EFEK-EFEK (lanjutan)

b. Berdasarkan mata uang, jenis dan penerbit (lanjutan)

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022
<u>Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (lanjutan)</u>		
<u>Rupiah (lanjutan)</u>		
<u>Pihak Berelasi (Catatan 43)</u>		
Obligasi		
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk		
Tahap II Seri D 2017	26.373	26.598
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)		
Tahap I Seri B 2021	24.962	24.647
Tahap II 2021	24.656	24.635
PT Bank Mandiri Taspen		
Tahap II Seri B 2021	20.139	20.108
Reksadana Terproteksi		
PT Bahana TCW Investment Management		
Bahana Centrum Protected Fund 232	307.647	-
PT BNI Asset Management		
BNI AM Proteksi Amarilis	305.072	-
PT Danareksa Investment Management		
Danareksa Proteksi 86	254.105	-
Medium Term Notes		
Perum Perumnas		
Tahap III Seri A 2018	100.000	103.083
	1.221.759	358.798
<u>Mata Uang Asing</u>		
<u>Dolar Amerika Serikat</u>		
<u>Pihak Berelasi (Catatan 43)</u>		
Obligasi		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk		
Euro Medium		
Term Notes (EMTN)-2024	61.242	60.977
Term Notes (EMTN)-2025	30.565	30.434
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk		
Unsecured Fixed	50.638	50.944
PT Pertamina (Persero)		
Senior Unsecured Notes		
Due 2030	28.044	27.093
Due 2050	38.295	36.038
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)		
Senior Notes - 2025	15.122	15.028
Medium Term Notes		
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia		
EMTN Programme		
Indonesia Eximbank - 2017	76.527	75.981
	300.433	296.495
	1.522.192	655.293
	1.928.336	655.293

8. SECURITIES (continued)

b. Based on currency, type and issuer (continued)

<u>Financial asset held at fair value through other comprehensive income (continued)</u>
<u>Rupiah (lanjutan)</u>
<u>Related Parties (Note 43)</u>
Bonds
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Phase II Series D 2017
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)
Phase I Series B 2021
Phase II 2021
PT Bank Mandiri Taspen
Phase II Series B 2021
Protected Mutual Funds
PT Bahana TCW Investment Management
RDT Bahana Centrum Protected Fund 232
PT BNI Asset Management
RDT BNI AM Proteksi Amarilis
PT Danareksa Investment Management
RDT Danareksa Proteksi 86
Medium Term Notes
Perum Perumnas
Phase III Series A 2018
<u>Foreign Currencies</u>
<u>United States Dollar</u>
<u>Related Parties (Note 43)</u>
Bonds
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Euro Medium
Term Notes (EMTN)-2024
Term Notes (EMTN)-2025
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk
Unsecured Fixed
PT Pertamina (Persero)
Senior Unsecured Notes
Due 2030
Due 2050
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)
Senior Notes - 2025
Medium Term Notes
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
EMTN Programme
Indonesia Eximbank - 2017

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

8. EFEK-EFEK (lanjutan)

b. Berdasarkan mata uang, jenis dan penerbit (lanjutan)

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022
<u>Diukur pada biaya perolehan</u>		
<u>di amortisasi</u>		
<u>Rupiah</u>		
<u>Pihak Ketiga</u>		
Obligasi		
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Tahap II Seri B 2018	-	77.150
PT Berlian Laju Tanker Sukuk Ijarah 2007	-	2.000
Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)	6.611	128
	6.611	79.278
<u>Pihak Berelasi (Catatan 43)</u>		
Obligasi		
PT Bank Mandiri Taspen Tahap II Seri A 2021	25.076	25.338
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Tahap III 2018	-	5.027
Medium Term Notes		
PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)	50.000	50.000
PT Dayamitra Telekomunikasi	50.000	-
Reksadana		
PT Permodalan Nasional Madani <i>Investment Management</i>	100.000	100.000
Sukuk		
PT Angkasa Pura I Tahap I 2023 (catatan 11.g)	1.465.771	-
Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)	638.066	14.401
	2.328.913	194.766
	2.335.524	274.044
Total	5.305.873	1.723.168
Cadangan kerugian penurunan nilai	(22.903)	(2.399)
Neto	5.282.970	1.720.769

8. SECURITIES (continued)

b. Based on currency, type and issuer (continued)

<u>Amortized cost</u>	
<u>Rupiah</u>	
<u>Third Parties</u>	
Bonds	
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk Phase II Series B 2018	
PT Berlian Laju Tanker Sukuk Ijarah 2007	
Domestic Documentary Letters of Credit	
<u>Related Parties (Note 43)</u>	
Bonds	
PT Bank Mandiri Taspen Phase II Series A 2021	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Phases III 2018	
Medium Term Notes	
PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)	
PT Dayamitra Telekomunikasi	
Mutual Funds	
PT Permodalan Nasional Madani <i>Investment Management</i>	
Sukuk	
PT Angkasa Pura I Phase I 2023 (note 11. g)	
Domestic Documentary Letters of Credit	
Total	
Allowance for impairment losses	
Net	

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

8. EFEK-EFEK (lanjutan)

b. Berdasarkan mata uang, jenis dan penerbit (lanjutan)

Berikut adalah perubahan efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainnya dan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022:

31 Desember/December 31, 2023

	Stage 1	Stage 2	Stage 3	Syariah ^{*)}	Total	
Efek-efek						Securities
Saldo awal	814.400	-	-	114.937	929.337	Beginning balance
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	30.357	-	-	(2.185)	28.172	Net remeasurement of carrying amount
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	3.469.043	-	-	-	3.469.043	New financial assets originated or purchased
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(160.692)	-	-	-	(160.692)	Derecognized financial assets
Aset keuangan yang dihapusbuku				(2.000)	(2.000)	Write-off financial assets
Saldo akhir tahun	4.153.108	-	-	110.752	4.263.860	Balance at the end of year

*) Tidak menerapkan PSAK No. 71, "Instrumen Keuangan"

*) Not applying SFAS No. 71, "Financial Instruments"

31 Desember/December 31, 2022

	Stage 1	Stage 2	Stage 3	Syariah ^{*)}	Total	
Efek-efek						Securities
Saldo awal	1.432.209	-	-	111.751	1.543.960	Beginning balance
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	(442.631)	-	-	143	(442.488)	Net remeasurement of carrying amount
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	761.634	-	-	28.176	789.810	New financial assets originated or purchased
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(936.812)	-	-	(25.133)	(961.945)	Derecognized financial assets
Saldo akhir tahun	814.400	-	-	114.937	929.337	Balance at the end of year

*) Tidak menerapkan PSAK No. 71, "Instrumen Keuangan"

*) Not applying SFAS No. 71 "Financial Instruments"

c. Jatuh tempo dan suku bunga

c. Maturity and interest rate

Penerbit	Jenis/ Type	Tanggal Jatuh Tempo/ Maturity Date	Suku Bunga/ Bagi Hasil Per Tahun/ Annual Interest Rate/ Profit Sharing	Issuer
Rupiah				Rupiah
PT Bank Pembangunan Jawa Barat dan Banten Tbk Tahap II 2018 B	Obligasi/Bonds	28 September/ September 28, 2023	9,50% tetap/ fixed	PT Bank Pembangunan Jawa Barat dan Banten Tbk Phase II 2018
PT Berlian Laju Tanker Tbk Sukuk Ijarah 2007	Obligasi/Bonds	5 Juli/ July 5, 2012	10,35% tetap/ fixed	PT Berlian Laju Tanker Tbk Sukuk Ijarah 2007
Perum Perumnas MTN Tahap III Tahun 2018 Seri A	Medium Term Notes	10 Desember/ December 10, 2026	11,85% tetap/ fixed	Perum Perumnas MTN Phase III Year 2018 Series A
PT Angkasa Pura I Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar 2023	Obligasi/Bonds	29 Oktober/ October 27, 2033	2,25% tetap/ fixed	PT Angkasa Pura I Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar 2023
PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) MTN Tahun 2022 Seri A	Medium Term Notes	2 November/ November 2, 2027	9,00% tetap/ fixed	PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) MTN Year 2022 Series A
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Tahap II Seri D 2017	Obligasi/Bonds	11 April/ April 11, 2027	8,80% tetap/ fixed	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Phase II Series D 2017

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

8. EFEK-EFEK (lanjutan)

8. SECURITIES (continued)

c. Jatuh tempo dan suku bunga (lanjutan)

c. Maturity and interest rate (continued)

Penerbit	Jenis/ Type	Tanggal Jatuh Tempo/ Maturity Date	Suku Bunga/ Bagi Hasil Per Tahun/ Annual Interest Rate/ Profit Sharing	Issuer
Rupiah				Rupiah
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Tahap III 2018	Obligasi/Bonds	21 September/ September 21, 2023	8,50% tetap/ fixed	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Phase III 2018
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) Tahap II 2021	Obligasi/Bonds	17 November/ November 17, 2026	6,00% tetap/ fixed	PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) Phase II 2021
Tahap I Seri B 2021	Obligasi/Bonds	8 Juli/ July 8, 2026	6,40% tetap/ fixed	Phase I Series B 2021
PT Bank Mandiri Taspen Tahap II Seri A 2021	Obligasi/Bonds	28 April/ April 28, 2024	6,50% tetap/ fixed	PT Bank Mandiri Taspen Phase II Series A 2021
Tahap II Seri B 2021	Obligasi/Bonds	26 April/ April 26, 2026	7,25% tetap/ fixed	Phase II Series B 2021
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Sukuk Tahap II Seri B 2017	Obligasi/Bonds	3 November/ November 3, 2027	8,20% tetap/ fixed	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Sukuk Phase II Series B 2017
PT Waskita Karya Realty Seri A 2022	Obligasi/Bonds	12 Mei/ May 12, 2027	6,65% tetap/ fixed	PT Waskita Karya Realty Series A 2022
PT Pegadaian (Persero) Sukuk Mudharabah IV 2021	Obligasi/Bonds	6 April/ April 6, 2024	6,00% tetap/ fixed	PT Pegadaian (Persero) Sukuk Mudharabah IV 2021
Sukuk Mudharabah II 2022	Obligasi/Bonds	16 Agustus/ August 16, 2025	5,75% tetap/ fixed	Sukuk Mudharabah II 2022
PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk MTN Tahun 2023	Medium Term Notes	6 Oktober/ October 6, 2024	6,20% tetap/ fixed	PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk MTN Tahun 2023
Mata Uang Asing Dolar Amerika Serikat Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia EMTN Programme Indonesia Eximbank - 2017	Medium Term Notes	6 April/ April 6, 2024	3,88% tetap/ fixed	Foreign Currencies United States Dollar Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia EMTN Programme Indonesia Eximbank - 2017
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk Unsecured Fixed Rate Notes	Obligasi/Bonds	16 Mei/ May 16, 2024	5,13% tetap/ fixed	PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk Unsecured Fixed Rate Notes
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Euro Medium Term Notes (EMTN) - 2024	Obligasi/Bonds	11 April/ April 11, 2024	3,75% tetap/ fixed	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Euro Medium Term Notes (EMTN) - 2024
Term Notes (EMTN) - 2025	Obligasi/Bonds	13 Mei/ May 13, 2025	4,75% tetap/ fixed	Term Notes (EMTN) - 2025
PT Pertamina (Persero) Senior Unsecured Notes Due 2030	Obligasi/Bonds	21 Januari/ January 21, 2030	3,10% tetap/ fixed	PT Pertamina (Persero) Senior Unsecured Notes Due 2030
Senior Unsecured Notes Due 2050	Obligasi/Bonds	21 Januari/ January 21, 2050	4,18% tetap/ fixed	Senior Unsecured Notes Due 2050
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Senior Unsecured Notes Due 2025	Obligasi/Bonds	5 Mei/ May 5, 2025	4,25% tetap/ fixed	PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Senior Unsecured Notes Due 2025

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

8. EFEK-EFEK (lanjutan)

- d. Berdasarkan sisa umur hingga jatuh tempo (efek-efek yang diukur pada biaya perolehan di amortisasi)

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022
≤ 1 tahun	448.505	96.706
> 1 tahun ≤ 5 tahun	421.248	175.338
> 5 tahun ≤ 10 tahun	1.465.771	-
> 10 tahun	-	2.000
Total	2.335.524	274.044

e. Peringkat

Daftar peringkat efek-efek seperti yang dilaporkan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia adalah sebagai berikut:

Penerbit	Jenis/ Type	31 Desember/ December 31, 2023
PT Bank Pembangunan Jawa Barat dan Banten Tbk Tahap II 2018 B	Obligasi/Bonds	-
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Tahap III 2018 Euro Medium Term Notes (EMTN) - 2024 Term Notes (EMTN) - 2025	Obligasi/Bonds Obligasi/Bonds Obligasi/Bonds	- Baa2*) Baa2*)
PT Bank Mandiri Taspen Tahap II Seri A 2021 Tahap II Seri B 2021	Obligasi/Bonds Obligasi/Bonds	AA**) AA**)
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) Tahap II 2021 Tahap I Seri B 2021	Obligasi/Bonds Obligasi/Bonds	idAAA idAAA
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk Unsecured Fixed Term Notes (EMTN) - 2024	Obligasi/Bonds	Baa2*)
PT Pertamina (Persero) Unsecured Fixed Term Notes (EMTN) - 2030 Term Notes (EMTN) - 2050	Obligasi/Bonds Obligasi/Bonds	Baa2*) Baa2*)
Perum Perumnas MTN Tahap III Tahun 2018 Seri A	Medium Term Notes	idBBB-
PT Dayamitra Telekomunikasi MTN Tahap I Tahun 2023	Medium Term Notes	idAAA
PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) MTN Tahun 2022	Medium Term Notes	idAAA
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Euro Medium Term Notes (EMTN) - 2017	Obligasi/Bonds	Baa2*)
PT Waskita Karya (Persero) Tbk Seri A 2022	Obligasi/Bonds	idAAA(gg)

*) Berdasarkan peringkat yang diterbitkan oleh Moody's
 **) Berdasarkan peringkat yang diterbitkan oleh Fitch

8. SECURITIES (continued)

- d. Remaining period to maturity (amortized cost securities)

≤ 1 year
> 1 year ≤ 5 years
> 5 year ≤ 10 years
> 10 years

e. Rating

The ratings of securities, as reported by PT Pemeringkat Efek Indonesia, are as follows:

Issuer
PT Bank Pembangunan Jawa Barat dan Banten Tbk Phase II 2018
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Phase III 2018 Euro Medium Term Notes (EMTN) - 2024 Term Notes (EMTN) - 2025
PT Bank Mandiri Taspen Phase II Series A 2021 Phase II Series B 2021
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) Phase II 2021 Phase I Series B 2021
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk Unsecured Fixed Term Notes (EMTN) - 2024
PT Pertamina (Persero) Unsecured Fixed Term Notes (EMTN) - 2030 Term Notes (EMTN) - 2050
Perum Perumnas MTN Phase III Year 2018 Series A
PT Dayamitra Telekomunikasi MTN Phase I Year 2023
PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) MTN Year 2022
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Euro Medium Term Notes (EMTN) - 2017
PT Waskita Karya (Persero) Tbk Series A 2022

*) Based on ratings published by Moody's
 **) Based on ratings published by Fitch

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

8. EFEK-EFEK (lanjutan)

e. Peringkat (lanjutan)

Daftar peringkat efek-efek seperti yang dilaporkan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Penerbit	Jenis/ Type	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	Issuer
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Senior Unsecured Notes Due 2025	Obligasi/Bonds	Baa2*)	Baa3*)	PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Senior Unsecured Notes Due 2025
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Tahap II Seri D 2017	Obligasi/Bonds	idAAA	idAAA	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Phase II Series D 2017
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Senior Unsecured Notes Due 2025	Obligasi/Bonds	Baa2*)	Baa3*)	PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Senior Unsecured Notes Due 2025
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Sukuk Tahap II 2017 Seri B	Obligasi/Bonds	idAAA(sy)	idAAA(sy)	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Sukuk Phase II 2017 Series B
PT Angkasa Pura I Sukuk Tahap I 2023	Obligasi/Bonds	idAA+(sy)	-	PT Angkasa Pura I Sukuk Phase I 2023
PT Pegadaian (Persero) Sukuk Mudharabah IV 2021 Sukuk Mudharabah II 2022	Obligasi/Bonds Obligasi/Bonds	idAAA(Sy) idAAA(Sy)	idAAA(Sy) idAAA(Sy)	PT Pegadaian (Persero) Sukuk Mudharabah IV 2021 Sukuk Mudharabah II 2022

*) Berdasarkan peringkat yang diterbitkan oleh Moody's

**) Berdasarkan peringkat yang diterbitkan oleh Fitch

*) Based on ratings published by Moody's

**) Based on ratings published by Fitch

f. Kolektibilitas

Kolektibilitas efek-efek adalah sebagai berikut:

f. Collectibility

The collectibility of securities are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
Lancar	5.199.375	1.628.411	Current
Dalam Perhatian Khusus	50.695	36.675	Special Mention
Kurang Lancar	4.644	3.148	Substandard
Diragukan	5.769	5.436	Doubtful
Macet	45.390	49.498	Loss
Total	5.305.873	1.723.168	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	(22.903)	(2.399)	Allowance for impairment losses
Neto	5.282.970	1.720.769	Net

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

8. EFEK-EFEK (lanjutan)

- g. Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

31 Desember/December 31, 2023					
	Stage 1	Stage 2	Stage 3	Syariah ^{*)}	Total
Efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainnya					
Saldo awal	51.959	-	-	-	51.959
Pengukuran kembali bersih penurunan nilai	4.902	-	-	-	4.902
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	790	-	-	-	790
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(3.618)	-	-	-	(3.618)
Pembayaran kembali valuta asing dan perubahan lain	5.924	-	-	-	5.924
Saldo akhir tahun	59.957	-	-	-	59.957

Securities at fair value through other comprehensive income
Beginning balance
Net remeasurement of impairment losses
New financial assets originated or purchased
Derecognized financial assets
Repayment foreign exchange and other movement
Balance at the end of year

31 Desember/December 31, 2022					
	Stage 1	Stage 2	Stage 3	Syariah ^{*)}	Total
Efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainnya					
Saldo awal	71.617	-	-	-	71.617
Pengukuran kembali bersih penurunan nilai	(20.889)	-	-	-	(20.889)
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	238	-	-	-	238
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(3.088)	-	-	-	(3.088)
Pembayaran kembali valuta asing dan perubahan lain	4.081	-	-	-	4.081
Saldo akhir tahun	51.959	-	-	-	51.959

Securities at fair value through other comprehensive income
Beginning balance
Net remeasurement of impairment losses
New financial assets originated or purchased
Derecognized financial assets
Repayment foreign exchange and other movement
Balance at the end of year

^{*)} Tidak menerapkan PSAK No. 71, "Instrumen Keuangan"

^{*)} Not applying SFAS No. 71, "Financial Instruments"

31 Desember/December 31, 2023					
	Stage 1	Stage 2	Stage 3	Syariah ^{*)}	Total
Efek-efek yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi					
Saldo awal	399	-	-	2.000	2.399
Pengukuran kembali bersih penurunan nilai	22.135	-	-	-	22.135
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	369	-	-	-	369
Aset keuangan yang dihapusbuku	-	-	-	(2.000)	(2.000)
Saldo akhir tahun	22.903	-	-	-	22.903

Securities at amortized cost
Beginning balance
Net remeasurement of impairment losses
New financial assets originated or purchased
Write off financial assets
Balance at the end of year

31 Desember/December 31, 2022					
	Stage 1	Stage 2	Stage 3	Syariah ^{*)}	Total
Efek-efek yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi					
Saldo awal	-	-	-	2.000	2.000
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	399	-	-	-	399
Saldo akhir tahun	399	-	-	2.000	2.399

Securities at amortized cost
Beginning balance
New financial assets originated or purchased
Balance at the end of year

^{*)} Tidak menerapkan PSAK No. 71, "Instrumen Keuangan"

^{*)} Not applying SFAS No. 71, "Financial Instruments"

- h. Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai efek-efek yang dibentuk telah memadai.

- h. Management believes that the allowance for impairment losses provided on securities is adequate.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

8. EFEK-EFEK (lanjutan)

- i. Bank mengakui keuntungan (kerugian) bersih atas penjualan efek-efek masing-masing sebesar Rp6.669 dan Rp(234.089), masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 yang disajikan dalam akun "Keuntungan (kerugian) dari penjualan efek-efek - neto" di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.
- j. Nilai pasar efek-efek yang diklasifikasikan sebagai "Nilai Wajar melalui Laba Rugi dan Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Penghasilan Komprehensif lain" pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, masing-masing berkisar dari 82,91% sampai dengan 105,49% dan 77,16% sampai dengan 125,88%.
- k. Bank mengakui keuntungan yang belum direalisasi bersih (setelah pajak tangguhan) sebesar Rp67.906 dan Rp35.792 dari perubahan nilai wajar efek-efek diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain termasuk cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp59.957 dan Rp51.959 masing-masing pada posisi 31 Desember 2023 dan 2022 dalam akun keuntungan yang belum direalisasi atas efek-efek dan obligasi pemerintah setelah pajak tangguhan dalam laporan posisi keuangan.
- l. Terdapat investasi efek-efek dengan pihak-pihak berelasi sebesar Rp3.851.105 dan Rp850.059, masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (Catatan 43).
- m. Informasi mengenai klasifikasi aset keuangan yang mengalami penurunan nilai dan tidak mengalami penurunan nilai diungkapkan pada Catatan 46.

9. OBLIGASI PEMERINTAH

- a. Berdasarkan tujuan, pihak berelasi dan pihak ketiga

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022
Pihak Berelasi (Catatan 43)		
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	3.796.440	19.591.199
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	12.511.991	14.332.949
Diukur pada biaya perolehan amortisasi	19.585.498	18.040.825
Total	35.893.929	51.964.973

8. SECURITIES (continued)

- i. The Bank recognized net gain (loss) on sale of securities amounting to Rp6,669 and Rp(234,089), for the year ended December 31, 2023 and 2022, respectively, which is presented in the statement of profit or loss and other comprehensive income as "Gain (losses) on sale of securities - net".
- j. As of December 31, 2023 and 2022, the market values of securities classified as fair value through profit or loss and Fair Value Through Other Comprehensive Income of nominal amounts range from 82.91% to 105.49% and range from 77.16% to 125.88% respectively.
- k. The Bank recognized unrealized gain - net (after deferred tax) of Rp67,906 and Rp35,792 from the changes in fair values through other comprehensive income include allowance for impairment losses amounted Rp59,957 and Rp51,959 as of December 31, 2023 and 2022, respectively, which are presented as unrealized gain (loss) on securities and government bonds, net of deferred tax in the statement of financial position.
- l. As of December 31, 2023 and 2022, investments in securities with related parties amounted to Rp3,851,105 and Rp850,059, respectively (Note 43).
- m. Information with respect to classification of impaired and not impaired financial assets are disclosed in Note 46.

9. GOVERNMENT BONDS

- a. Based on purpose, related party and third party

Related Party (Note 43)
Fair value through profit or loss
Fair value through other comprehensive income
Amortized cost
Total

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

9. OBLIGASI PEMERINTAH (lanjutan)

9. GOVERNMENT BONDS (continued)

b. Berdasarkan mata uang dan jenis

b. Based on currency and type

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
<u>Pihak berelasi</u>			<u>Related parties</u>
<u>Nilai wajar melalui laba rugi</u>			<u>Fair value through profit or loss</u>
<u>Rupiah</u>			<u>Rupiah</u>
Tingkat bunga tetap			Fixed interest rate
FR 0081	201.564	-	FR 0081
FR 0086	170.509	-	FR 0086
FR 0075	156.057	206	FR 0075
FR 0092	93.940	16.136	FR 0092
FR 0084	59.682	20.526	FR 0084
FR 0070	43.057	-	FR 0070
FR 0098	41.970	-	FR 0098
FR 0097	36.310	701	FR 0097
FR 0101	30.504	-	FR 0101
FR 0079	28.757	-	FR 0079
FR 0072	22.568	23.366	FR 0072
ORI 021	20.894	496	ORI 021
FR 0096	20.814	52.743	FR 0096
FR 0091	19.791	73.201	FR 0091
PBS 033	19.214	-	PBS 033
FR 0095	15.771	70.191	FR 0095
PBS 036	14.105	-	PBS 036
ORI 020	11.647	-	ORI 020
ORI 022	11.436	-	ORI 022
FR 0074	10.588	207	FR 0074
FR 0083	9.723	11.643	FR 0083
FR 0089	7.399	-	FR 0089
FR 0059	7.119	-	FR 0059
FR 0090	7.044	33.017	FR 0090
SR 0016	5.486	-	SR 0016
FR 0073	3.141	-	FR 0073
FR 0044	3.073	-	FR 0044
FR 0093	2.438	290	FR 0093
FR 0088	1.455	65	FR 0088
PBS 026	1.000	-	PBS 026
SR 0014	618	80	SR 0014
FR 0076	211	-	FR 0076
FR 0062	196	-	FR 0062
FR 0071	-	88.494	FR 0071
FR 0040	-	55.701	FR 0040
FR 0068	-	54.890	FR 0068
PBS 017	-	51.220	PBS 017
FR 0046	-	46.040	FR 0046
FR 0080	-	41.472	FR 0080
ORI 018	-	40.110	ORI 018
FR 0087	-	30.396	FR 0087
FR 0064	-	10.370	FR 0064
FR 0078	-	9.002	FR 0078
ORI 019	-	2.087	ORI 019
SR 0017	-	198	SR 0017
SR 0015	-	191	SR 0015
FR 0085	-	187	FR 0085
FR 0065	-	97	FR 0065
ORI 017	-	70	ORI 017
SR 0012	-	50	SR 0012
	1.078.081	733.443	

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

9. OBLIGASI PEMERINTAH (lanjutan)

b. Berdasarkan mata uang dan jenis (lanjutan)

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022
Pihak berelasi (lanjutan)		
<u>Nilai wajar melalui laba rugi (lanjutan)</u>		
<u>Mata uang asing</u>		
<u>Dolar Amerika Serikat</u>		
Tingkat bunga tetap		
INDOIS 2024	2.379	-
INDOIS 2031	-	18.773
INDON 2024N	-	609
 Zero Coupon Bonds		
SPN12240201	1.367.851	-
SPN12240229	746.378	-
SPN12240104	577.100	-
SPN03240313	24.651	-
SPN12230303	-	3.334.531
SPN12230203	-	2.779.061
SPN12230105	-	2.061.001
SPN12230413	-	1.744.737
SPN12230526	-	1.494.707
SPN12230330	-	1.284.484
SPN12230622	-	1.220.975
SPN03230208	-	760.534
SPN12230818	-	750.789
SPN12230914	-	723.728
SPN03230222	-	496.595
SPNS02052023	-	473.497
SPNS07032023	-	421.154
SPN03230111	-	349.606
SPNS10012023	-	299.754
SPN12231207	-	224.643
SPN03230308	-	99.130
SPN12230720	-	97.296
SPN12231012	-	96.027
SPN12231109	-	95.755
SPNS07022023	-	49.752
	2.715.980	18.857.756
	3.796.440	19.591.199

Aset keuangan yang diukur pada
nilai wajar melalui penghasilan
komprehensif lain

<u>Rupiah</u>		
Tingkat bunga tetap		
FR 0083	540.390	1.360.887
FR 0078	490.381	490.508
FR 0084	482.823	489.041
FR 0090	472.787	470.978
FR 0042	425.627	435.458
FR 0056	419.566	427.016
FR 0040	375.507	389.801
FR 0071	348.849	350.602
FR 0059	320.355	323.036
FR 0081	270.087	272.327

9. GOVERNMENT BONDS (continued)

b. Based on currency and type (continued)

Related parties (continued)	
<u>Fair value through profit or loss (continued)</u>	
<u>Foreign Currencies</u>	
<u>United States Dollar</u>	
<u>Fixed interest rate</u>	
INDOIS 2024	-
INDOIS 2031	18.773
INDON 2024N	609
 Zero Coupon Bonds	
SPN12240201	-
SPN12240229	-
SPN12240104	-
SPN03240313	-
SPN12230303	3.334.531
SPN12230203	2.779.061
SPN12230105	2.061.001
SPN12230413	1.744.737
SPN12230526	1.494.707
SPN12230330	1.284.484
SPN12230622	1.220.975
SPN03230208	760.534
SPN12230818	750.789
SPN12230914	723.728
SPN03230222	496.595
SPNS02052023	473.497
SPNS07032023	421.154
SPN03230111	349.606
SPNS10012023	299.754
SPN12231207	224.643
SPN03230308	99.130
SPN12230720	97.296
SPN12231012	96.027
SPN12231109	95.755
SPNS07022023	49.752

Financial asset held at fair
value through other
comprehensive income

<u>Rupiah</u>	
<u>Fixed interest rate</u>	
FR 0083	1.360.887
FR 0078	490.508
FR 0084	489.041
FR 0090	470.978
FR 0042	435.458
FR 0056	427.016
FR 0040	389.801
FR 0071	350.602
FR 0059	323.036
FR 0081	272.327

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

9. OBLIGASI PEMERINTAH (lanjutan)

b. Berdasarkan mata uang dan jenis (lanjutan)

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022
<u>Aset keuangan yang diukur pada</u> <u>nilai wajar melalui penghasilan</u> <u>komprehensif lain (lanjutan)</u> <u>Rupiah (lanjutan)</u> Tingkat bunga tetap (lanjutan)		
FR 0087	269.194	263.695
FR 0091	250.102	243.430
FR 0044	233.128	241.971
FR 0052	203.717	205.584
FR 0073	142.338	140.750
FR 0037	125.128	129.092
FR 0077	122.766	129.035
FR 0082	51.174	156.466
FR 0054	-	47.085
FR 0068	-	567.123
FR 0072	-	369.052
FR 0075	-	188.673
FR 0039	-	171.841
FR 0046	-	102.310
FR 0085	-	57.797
FR 0062	-	57.785
	5.543.919	8.081.343
 Obligasi Syariah Negara		
PBSG 001	542.139	4.199
PBS 003	338.469	191.598
PBS 017	303.279	308.382
PBS 030	276.560	273.796
PBS 026	253.450	254.920
PBS 037	250.434	-
PBS 032	193.968	194.051
PBS 033	156.676	32.921
PBS 025	106.808	105.392
PBS 029	102.918	101.669
PBS 038	99.621	-
PBS 022	78.965	79.275
PBS 028	73.878	71.208
PBS 021	68.795	71.851
PBS 012	59.863	59.124
PBS 004	46.542	45.960
PBS 034	34.736	32.610
PBS 027	-	479.969
PBS 019	-	104.917
PBS 011	-	8.209
	2.987.101	2.420.051
 <u>Mata uang asing</u> <u>Dolar Amerika Serikat</u> Tingkat bunga tetap		
INDON 2047	825.805	775.119
INDON 2046	579.496	544.954
INDON 2038	545.560	516.227
INDON 2044	413.980	383.132
INDON 2043	383.217	361.545
INDON 2045	338.525	365.197
INDON 2048	215.720	203.418
INDON 2049	171.050	158.781
INDOIS 2050	134.838	127.609
INDON 2049N	112.072	116.540
INDON 2037	102.953	127.775
INDON 2050N	97.039	90.032
USDFR0002	60.716	61.226
	3.980.971	3.831.555
	12.511.991	14.332.949

9. GOVERNMENT BONDS (continued)

b. Based on currency and type (continued)

<u>Financial asset held at fair</u> <u>value through other</u> <u>comprehensive income (continued)</u> <u>Rupiah (continued)</u> Fixed interest rate (continued)	
FR 0087	FR 0087
FR 0091	FR 0091
FR 0044	FR 0044
FR 0052	FR 0052
FR 0073	FR 0073
FR 0037	FR 0037
FR 0077	FR 0077
FR 0082	FR 0082
FR 0054	FR 0054
FR 0068	FR 0068
FR 0072	FR 0072
FR 0075	FR 0075
FR 0039	FR 0039
FR 0046	FR 0046
FR 0085	FR 0085
FR 0062	FR 0062
 Government Sharia Bond	
PBSG 001	PBSG 001
PBS 003	PBS 003
PBS 017	PBS 017
PBS 030	PBS 030
PBS 026	PBS 026
PBS 037	PBS 037
PBS 032	PBS 032
PBS 033	PBS 033
PBS 025	PBS 025
PBS 029	PBS 029
PBS 038	PBS 038
PBS 022	PBS 022
PBS 028	PBS 028
PBS 021	PBS 021
PBS 012	PBS 012
PBS 004	PBS 004
PBS 034	PBS 034
PBS 027	PBS 027
PBS 019	PBS 019
PBS 011	PBS 011
 <u>Foreign Currencies</u> <u>United States Dollar</u> Fixed interest rate	
INDON 2047	INDON 2047
INDON 2046	INDON 2046
INDON 2038	INDON 2038
INDON 2044	INDON 2044
INDON 2043	INDON 2043
INDON 2045	INDON 2045
INDON 2048	INDON 2048
INDON 2049	INDON 2049
INDOIS 2050	INDOIS 2050
INDON 2049N	INDON 2049N
INDON 2037	INDON 2037
INDON 2050N	INDON 2050N
USDFR0002	USDFR0002

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

9. OBLIGASI PEMERINTAH (lanjutan)

9. GOVERNMENT BONDS (continued)

b. Berdasarkan mata uang dan jenis (lanjutan)

b. Based on currency and type (continued)

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
<u>Diukur pada biaya</u> <u>perolehan amortisasi</u> <u>Rupiah</u>			<u>Amortized cost</u> <u>Rupiah</u>
Tingkat bunga tetap			Fixed interest rate
FR 0081	1.452.798	1.457.898	FR 0081
FR 0084	1.212.730	1.231.951	FR 0084
FR 0086	1.138.797	1.137.564	FR 0086
FR 0056	1.126.953	1.048.174	FR 0056
FR 0059	923.741	442.347	FR 0059
FR 0064	900.859	835.184	FR 0064
FR 0047	784.201	804.972	FR 0047
FR 0070	431.886	440.831	FR 0070
FR 0085	403.858	405.264	FR 0085
FR 0078	336.975	340.917	FR 0078
FR 0044	288.687	300.342	FR 0044
FR 0040	272.759	284.041	FR 0040
FR 0087	263.786	262.628	FR 0087
FR 0082	238.723	238.580	FR 0082
FR 0054	149.411	151.148	FR 0054
FR 0071	134.592	137.061	FR 0071
FR 0073	130.747	131.814	FR 0073
FR 0077	101.037	103.718	FR 0077
FR 0090	96.277	95.292	FR 0090
FR 0088	75.251	74.948	FR 0088
FR 0037	74.779	78.003	FR 0037
FR 0091	47.656	47.456	FR 0091
FR 0065	46.676	46.442	FR 0065
FR 0052	41.116	41.811	FR 0052
FR 0042	16.524	16.889	FR 0042
FR 0046	-	41.273	FR 0046
FR 0039	-	14.565	FR 0039
	10.690.819	10.211.113	
Obligasi Syariah Negara			Government Sharia Bond
Sukuk BI	8.421.151	7.116.523	Sukuk BI
	8.421.151	7.116.523	
	19.111.970	17.327.636	
<u>Mata uang asing</u> <u>Dolar Amerika Serikat</u>			<u>Foreign Currencies</u> <u>United States Dollar</u>
Tingkat bunga tetap			Fixed interest rate
INDON 2026	246.600	257.113	INDON 2026
INDOIS 2024	100.642	102.380	INDOIS 2024
INDON 2025	95.492	99.348	INDON 2025
INDOIS 2024N	30.794	31.135	INDOIS 2024N
INDOIS 2023	-	128.695	INDOIS 2023
INDON 2023	-	62.816	INDON 2023
INDON 2023 N	-	31.702	INDON 2023 N
	473.528	713.189	
	19.585.498	18.040.825	
Total	35.893.929	51.964.973	Total

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

9. OBLIGASI PEMERINTAH (lanjutan)

c. Berdasarkan jatuh tempo dan suku bunga

Keterangan	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date
Nilai wajar melalui laba rugi	
<u>Rupiah</u>	
Tingkat bunga tetap	
FR 0040	15 September/ September 15, 2025
FR 0044	15 September/ September 15, 2024
FR 0046	15 Juli/ July 15, 2023
FR 0054	15 Juli/ July 15, 2031
FR 0056	15 September/ September 15, 2026
FR 0059	15 Mei/ May 15, 2027
FR 0062	15 April/ April 15, 2042
FR 0064	15 Mei/ May 15, 2028
FR 0065	15 Mei/ May 15, 2033
FR 0068	15 Maret/ March 15, 2034
FR 0070	15 Maret/ March 15, 2024
FR 0071	15 Maret/ March 15, 2029
FR 0072	15 Mei/ May 15, 2036
FR 0073	15 Mei/ May 15, 2031
FR 0074	15 Agustus/ August 15, 2032
FR 0075	15 Mei/ May 15, 2038
FR 0076	15 Mei/ May 15, 2048
FR 0078	15 Mei/ May 15, 2029
FR 0079	15 April/ April 15, 2039
FR 0080	15 Juni/ June 15, 2035
FR 0081	15 Juni/ June 15, 2025
FR 0083	15 April/ April 15, 2040
FR 0084	15 Februari/ February 15, 2026
FR 0085	15 April/ April 15, 2031
FR 0086	15 April/ April 15, 2026
FR 0087	15 Februari/ February 15, 2031
FR 0088	15 Juni/ June 15, 2036
FR 0089	15 Agustus/ August 15, 2051
FR 0090	15 April/ April 15, 2027
FR 0091	15 April/ April 15, 2032
FR 0092	15 Juni/ June 15, 2042
FR 0093	15 Juli/ July 15, 2037
FR 0095	15 Agustus/ August 15, 2028
FR 0096	15 Februari/ February 15, 2033
FR 0097	15 Juni/ June 15, 2043
FR 0098	15 Juni/ June 15, 2038

9. GOVERNMENT BONDS (continued)

c. Based on maturity and interest rate

Suku Bunga/ Interest Rate	Description
	Fair value through profit or loss
	<u>Rupiah</u>
	Fixed interest rate
	FR 0040
11,00% tetap/ fixed	FR 0044
10,00% tetap/ fixed	FR 0046
9,50% tetap/ fixed	FR 0054
9,50% tetap/ fixed	FR 0056
8,38% tetap/ fixed	FR 0059
7,00% tetap/ fixed	FR 0062
6,38% tetap/ fixed	FR 0064
6,13% tetap/ fixed	FR 0065
6,63% tetap/ fixed	FR 0068
8,38% tetap/ fixed	FR 0070
8,38% tetap/ fixed	FR 0071
9,00% tetap/ fixed	FR 0072
8,25% tetap/ fixed	FR 0073
8,75% tetap/ fixed	FR 0074
7,50% tetap/ fixed	FR 0075
7,50% tetap/ fixed	FR 0076
7,38% tetap/ fixed	FR 0078
8,25% tetap/ fixed	FR 0079
8,38% tetap/ fixed	FR 0080
7,50% tetap/ fixed	FR 0081
6,50% tetap/ fixed	FR 0083
7,50% tetap/ fixed	FR 0084
7,25% tetap/ fixed	FR 0085
7,75% tetap/ fixed	FR 0086
5,50% tetap/ fixed	FR 0087
6,50% tetap/ fixed	FR 0088
6,25% tetap/ fixed	FR 0089
6,88% tetap/ fixed	FR 0090
5,13% tetap/ fixed	FR 0091
6,38% tetap/ fixed	FR 0092
7,13% tetap/ fixed	FR 0093
6,38% tetap/ fixed	FR 0095
6,38% tetap/ fixed	FR 0096
7,00% tetap/ fixed	FR 0097
7,13% tetap/ fixed	FR 0098
7,13% tetap/ fixed	FR 0098

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

9. OBLIGASI PEMERINTAH (lanjutan)

9. GOVERNMENT BONDS (continued)

c. Berdasarkan jatuh tempo dan suku bunga (lanjutan)

c. Based on maturity and interest rate (continued)

Keterangan	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Suku Bunga/ Interest Rate
<u>Nilai wajar melalui laba rugi (lanjutan)</u>		
<u>Rupiah (lanjutan)</u>		
Tingkat bunga tetap		
FR 0101	15 April/ April 15, 2029	6,88% tetap/ fixed
ORI 017	15 Juli/ July 15, 2023	6,40% tetap/ fixed
ORI 018	15 Oktober/ October 15, 2023	5,70% tetap/ fixed
ORI 019	15 Februari/ February 15, 2024	5,57% tetap/ fixed
ORI 020	15 Oktober/ October 15, 2024	4,95% tetap/ fixed
ORI 021	15 Februari/ February 15, 2025	4,90% tetap/ fixed
ORI 022	15 Oktober/ October 15, 2025	5,95% tetap/ fixed
ORI 023T3	15 Juli/ July 15, 2026	5,90% tetap/ fixed
PBS 017	15 Oktober/ October 15, 2025	6,13% tetap/ fixed
PBS 026	15 Oktober/ October 15, 2024	6,63% tetap/ fixed
PBS 033	15 Juni/ June 15, 2047	6,75% tetap/ fixed
PBS 036	15 Agustus/ Agustus 15, 2025	5,38% tetap/ fixed
SR 0012	10 Maret/ March 10, 2023	6,30% tetap/ fixed
SR 0014	10 Maret/ March 10, 2024	5,47% tetap/ fixed
SR 0015	10 September/ September 10, 2024	5,10% tetap/ fixed
SR 0016	10 Maret/ March 10, 2025	4,95% tetap/ fixed
SR 0017	10 September/ September 10, 2025	5,90% tetap/ fixed
Zero Coupon Bonds SPN	Beragam/ Various	Beragam/ Various
<u>Mata uang asing</u>		
<u>Dolar Amerika Serikat</u>		
Tingkat bunga tetap		
INDOIS 2025	28 Mei/ May 28, 2025	4,325% tetap/ fixed
INDOIS 2024	10 September/ September 10, 2024	4,35% tetap/ fixed
<u>Aset keuangan yang diukur pada</u>		
<u>nilai wajar melalui penghasilan</u>		
<u>komprehensif lain</u>		
<u>Rupiah</u>		
Tingkat bunga tetap		
FR 0037	15 September/ September 15, 2026	12,00% tetap/ fixed
FR 0039	15 Agustus/ August 15, 2023	11,75% tetap/ fixed
FR 0040	15 September/ September 15, 2025	11,00% tetap/ fixed
FR 0042	15 Juli/ July 15, 2027	10,25% tetap/ fixed
FR 0044	15 September/ September 15, 2024	10,00% tetap/ fixed

Description
<u>Fair value through profit or loss (continued)</u>
<u>Rupiah (continued)</u>
Fixed interest rate
FR 0101
ORI 017
ORI 018
ORI 019
ORI 020
ORI 021
ORI 022
ORI 023T3
PBS 017
PBS 026
PBS 033
PBS 036
SR 0012
SR 0014
SR 0015
SR 0016
SR 0017
Zero Coupon Bonds
SPN
<u>Foreign Currencies</u>
<u>United States Dollar</u>
Fixed interest rate
INDOIS 2025
INDOIS 2024

<u>Financial asset held at fair</u>	
<u>value through other</u>	
<u>comprehensive income</u>	
<u>Rupiah</u>	
Fixed interest rate	
FR 0037	
FR 0039	
FR 0040	
FR 0042	
FR 0044	

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

9. OBLIGASI PEMERINTAH (lanjutan)

c. Berdasarkan jatuh tempo dan suku bunga (lanjutan)

Keterangan	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Suku Bunga/ Interest Rate
<u>Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (lanjutan)</u> <u>Rupiah (lanjutan)</u> Tingkat bunga tetap		
FR 0046	15 Juli/ July 15, 2023	9,50% tetap/ fixed
FR 0052	15 Agustus/ August 15, 2030	10,50% tetap/ fixed
FR 0054	15 Juli/ July 15, 2031	9,50% tetap/ fixed
FR 0056	15 September/ September 15, 2026	8,38% tetap/ fixed
FR 0059	15 Mei/ May 15, 2027	7,00% tetap/ fixed
FR 0062	15 April/ April 15, 2042	6,38% tetap/ fixed
FR 0068	15 Maret/ March 15, 2034	8,38% tetap/ fixed
FR 0071	15 Maret/ March 15, 2029	9,00% tetap/ fixed
FR 0072	15 Mei/ May 15, 2036	8,25% tetap/ fixed
FR 0073	15 Mei/ May 15, 2031	8,75% tetap/ fixed
FR 0075	15 Mei/ May 15, 2038	7,50% tetap/ fixed
FR 0077	15 Mei/ May 15, 2024	8,13% tetap/ fixed
FR 0078	15 Mei/ May 15, 2029	8,25% tetap/ fixed
FR 0081	15 Juni/ June 15, 2025	6,50% tetap/ fixed
FR 0082	15 September/ September 15, 2030	7,00% tetap/ fixed
FR 0083	15 April/ April 15, 2040	7,50% tetap/ fixed
FR 0084	15 Februari/ February 15, 2026	7,25% tetap/ fixed
FR 0085	15 April/ April 15, 2031	7,75% tetap/ fixed
FR 0087	15 Februari/ February 15, 2031	6,50% tetap/ fixed
FR 0090	15 April/ April 15, 2027	5,13% tetap/ fixed
FR 0091	15 April/ April 15, 2032	6,38% tetap/ fixed

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain
Rupiah

Tingkat bunga tetap
Obligasi Syariah Negara
PBS 003

PBS 004	15 Januari/ January 15, 2027	6,00% tetap/ fixed
PBS 011	15 Februari/ February 15, 2037	6,10% tetap/ fixed
PBS 012	15 Agustus/ August 15, 2023	8,75% tetap/ fixed
PBS 017	15 November/ November 15, 2031	8,88% tetap/ fixed
	15 Oktober/ October 15, 2025	6,13% tetap/ fixed

9. GOVERNMENT BONDS (continued)

c. Based on maturity and interest rate (continued)

Description	Suku Bunga/ Interest Rate
<u>Financial asset held at fair value through other comprehensive income (continued)</u> <u>Rupiah (continued)</u> Fixed interest rate	
FR 0046	9,50% tetap/ fixed
FR 0052	10,50% tetap/ fixed
FR 0054	9,50% tetap/ fixed
FR 0056	8,38% tetap/ fixed
FR 0059	7,00% tetap/ fixed
FR 0062	6,38% tetap/ fixed
FR 0068	8,38% tetap/ fixed
FR 0071	9,00% tetap/ fixed
FR 0072	8,25% tetap/ fixed
FR 0073	8,75% tetap/ fixed
FR 0075	7,50% tetap/ fixed
FR 0077	8,13% tetap/ fixed
FR 0078	8,25% tetap/ fixed
FR 0081	6,50% tetap/ fixed
FR 0082	7,00% tetap/ fixed
FR 0083	7,50% tetap/ fixed
FR 0084	7,25% tetap/ fixed
FR 0085	7,75% tetap/ fixed
FR 0087	6,50% tetap/ fixed
FR 0090	5,13% tetap/ fixed
FR 0091	6,38% tetap/ fixed

Financial asset held at fair value through other comprehensive income
Rupiah

Fixed interest rate
Government Sharia Bonds
PBS 003

PBS 004	6,10% tetap/ fixed
PBS 011	8,75% tetap/ fixed
PBS 012	8,88% tetap/ fixed
PBS 017	6,13% tetap/ fixed

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

9. OBLIGASI PEMERINTAH (lanjutan)

c. Berdasarkan jatuh tempo dan suku bunga (lanjutan)

Keterangan	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Suku Bunga/ Interest Rate
<u>Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (lanjutan)</u>		
<u>Rupiah (lanjutan)</u>		
Tingkat bunga tetap		
Obligasi Syariah Negara		
PBS 019	15 September/ September 15, 2023	8,25% tetap/ fixed
PBS 021	15 November/ November 15, 2026	8,50% tetap/ fixed
PBS 022	15 April/ April 15, 2034	8,63% tetap/ fixed
PBS 025	15 Mei/ May 15, 2033	8,38% tetap/ fixed
PBS 026	15 Oktober/ October 15, 2024	6,63% tetap/ fixed
PBS 027	15 Mei/ May 15, 2023	6,55% tetap/ fixed
PBS 028	15 Oktober/ October 15, 2046	7,75% tetap/ fixed
PBS 029	15 Maret/ March 15, 2034	6,38% tetap/ fixed
PBS 030	15 Juli/ July 15, 2028	5,88% tetap/ fixed
PBS 032	15 Juli/ July 15, 2026	4,88% tetap/ fixed
PBS 033	15 Juni/ July 15, 2047	6,75% tetap/ fixed
PBS 034	15 Juni/ July 15, 2039	6,50% tetap/ fixed
PBS 037	15 Maret/ March 15, 2036	6,88% tetap/ fixed
PBS 038	15 Desember/ December 15, 2049	6,88% tetap/ fixed
PBSG001	15 September/ September 15, 2029	6,63% tetap/ fixed
<u>Mata uang asing</u>		
<u>Dolar Amerika Serikat</u>		
Tingkat bunga tetap		
INDOIS 2050	23 Juni/ June 23, 2050	3,80% tetap/ fixed
INDON 2037	17 Februari/ February 17, 2037	6,63% tetap/ fixed
INDON 2038	17 Januari/ January 17, 2038	7,75% tetap/ fixed
INDON 2043	15 April/ April 15, 2043	4,63% tetap/ fixed
INDON 2044	15 Januari/ January 15, 2044	6,75% tetap/ fixed
INDON 2045	15 Januari/ January 15, 2045	5,13% tetap/ fixed
INDON 2046	8 Januari/ January 8, 2046	5,95% tetap/ fixed
INDON 2047	8 Januari/ January 8, 2047	5,25% tetap/ fixed
INDON 2048	11 Januari/ January 11, 2048	4,35% tetap/ fixed
INDON 2049	11 Februari/ February 11, 2049	5,35% tetap/ fixed
INDON 2049N	30 Oktober/ October 30, 2049	3,70% tetap/ fixed
INDON 2050N	15 Oktober/ October 15, 2050	4,20% tetap/ fixed
USD FR 0002	24 Juni/ June 24, 2026	4,05% tetap/ fixed

9. GOVERNMENT BONDS (continued)

c. Based on maturity and interest rate (continued)

Description
<u>Financial asset held at fair value through other comprehensive income (continued)</u>
<u>Rupiah (continued)</u>
Fixed interest rate
Government Sharia Bonds
PBS 019
PBS 021
PBS 022
PBS 025
PBS 026
PBS 027
PBS 028
PBS 029
PBS 030
PBS 032
PBS 033
PBS 034
PBS 037
PBS 038
PBSG001
<u>Foreign Currencies</u>
<u>United States Dollar</u>
Fixed interest rate
INDOIS 2050
INDON 2037
INDON 2038
INDON 2043
INDON 2044
INDON 2045
INDON 2046
INDON 2047
INDON 2048
INDON 2049
INDON 2049N
INDON 2050N
USD FR 0002

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

9. OBLIGASI PEMERINTAH (lanjutan)

c. Berdasarkan jatuh tempo dan suku bunga (lanjutan)

Keterangan	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Suku Bunga/ Interest Rate	Description
<u>Diukur pada biaya</u> <u>perolehan amortisasi</u> <u>Rupiah</u> Tingkat bunga tetap			<u>Amortized cost</u> <u>Rupiah</u> Fixed interest rate
FR 0037	15 September/ September 15, 2026	12,00% tetap/ fixed	FR 0037
FR 0039	15 Agustus/ August 15, 2023	11,75% tetap/ fixed	FR 0039
FR 0040	15 September/ September 15, 2025	11,00% tetap/ fixed	FR 0040
FR 0042	15 Juli/ July 15, 2027	10,25% tetap/ fixed	FR 0042
FR 0044	15 September/ September 15, 2024	10,00% tetap/ fixed	FR 0044
FR 0046	15 Juli/ July 15, 2023	9,50% tetap/ fixed	FR 0046
FR 0047	15 Februari/ February 15, 2028	10,00% tetap/ fixed	FR 0047
FR 0052	15 Agustus/ August 15, 2030	10,50% tetap/ fixed	FR 0052
FR 0054	15 Juli/ July 15, 2031	9,50% tetap/ fixed	FR 0054
FR 0056	15 September/ September 15, 2026	8,38% tetap/ fixed	FR 0056
FR 0059	15 Mei/ May 15, 2027	7,00% tetap/ fixed	FR 0059
FR 0064	15 Mei/ May 15, 2028	6,13% tetap/ fixed	FR 0064
FR 0065	15 Mei/ May 15, 2033	6,63% tetap/ fixed	FR 0065
FR 0070	15 Maret/ March 15, 2024	8,38% tetap/ fixed	FR 0070
FR 0071	15 Maret/ March 15, 2029	9,00% tetap/ fixed	FR 0071
FR 0073	15 Mei/ May 15, 2031	8,75% tetap/ fixed	FR 0073
FR 0077	15 Mei/ May 15, 2024	8,13% tetap/ fixed	FR 0077
FR 0078	15 Mei/ May 15, 2029	8,25% tetap/ fixed	FR 0078
FR 0081	15 Juni/ June 15, 2025	6,50% tetap/ fixed	FR 0081
FR 0082	15 September/ September 15, 2030	7,00% tetap/ fixed	FR 0082
FR 0084	15 Februari/ February 15, 2026	7,25% tetap/ fixed	FR 0084
FR 0085	15 April/ April 15, 2031	7,75% tetap/ fixed	FR 0085
FR 0086	15 April/ April 15, 2026	5,50% tetap/ fixed	FR 0086
FR 0087	15 Februari/ February 15, 2031	6,50% tetap/ fixed	FR 0087
FR 0088	15 Juni/ June 15, 2036	6,25% tetap/ fixed	FR 0088
FR 0090	15 April/ April 15, 2027	5,13% tetap/ fixed	FR 0090
FR 0091	15 April/ April 15, 2032	6,38% tetap/ fixed	FR 0091
Obligasi Syariah Negara			Government Sharia Bond
Sukuk BI	3 Januari/ January 3, 2024	6,00% tetap/ fixed	Sukuk BI
Sukuk BI	3 Januari/ January 3, 2024	6,16% tetap/ fixed	Sukuk BI
Sukuk BI	5 Januari/ January 5, 2024	6,00% tetap/ fixed	Sukuk BI
Sukuk BI	5 Januari/ January 5, 2024	6,31% tetap/ fixed	Sukuk BI
Sukuk BI	5 Januari/ January 5, 2024	6,67% tetap/ fixed	Sukuk BI
Sukuk BI	10 Januari/ January 10, 2024	6,16% tetap/ fixed	Sukuk BI
Sukuk BI	17 Januari/ January 17, 2024	6,16% tetap/ fixed	Sukuk BI

9. GOVERNMENT BONDS (continued)

c. Based on maturity and interest rate (continued)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

9. OBLIGASI PEMERINTAH (lanjutan)

c. Berdasarkan jatuh tempo dan suku bunga (lanjutan)

Keterangan	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date
<u>Diukur pada biaya</u>	
<u>perolehan amortisasi (lanjutan)</u>	
<u>Rupiah (lanjutan)</u>	
Tingkat bunga tetap	
Obligasi Syariah Negara (lanjutan)	
Sukuk BI	24 Januari/ January 24, 2024
Sukuk BI	2 Februari/ February 2, 2024
Sukuk BI	2 Februari/ February 2, 2024
Sukuk BI	2 Februari/ February 2, 2024
Sukuk BI	15 Februari/ February 15, 2024
Sukuk BI	28 Februari/ February 28, 2024
Sukuk BI	1 Maret/ March 1, 2024
Sukuk BI	8 Maret/ March 8, 2024
Sukuk BI	15 Maret/ March 15, 2024
Sukuk BI	27 Maret/ March 27, 2024
Sukuk BI	1 April/ April 1, 2024
Sukuk BI	5 April/ April 5, 2024
Sukuk BI	12 April/ April 12, 2024
Sukuk BI	3 Mei/ May 3, 2024
Sukuk BI	3 Mei/ May 3, 2024
Sukuk BI	3 Mei/ May 3, 2024
Sukuk BI	7 Juni/ June 7, 2024
Sukuk BI	7 Juni/ June 7, 2024
Sukuk BI	14 Juni/ June 14, 2024
Sukuk BI	5 Juli/ July 5, 2024
Sukuk BI	12 Juli/ July 12, 2024
Sukuk BI	2 Agustus/ August 2, 2024
Sukuk BI	2 Agustus/ August 2, 2024
Sukuk BI	6 September/ September 6, 2024
Sukuk BI	13 September/ September 13, 2024
Sukuk BI	11 Oktober/ October 11, 2024
Sukuk BI	1 November/ November 1, 2024
Sukuk BI	6 Desember/ December 6, 2024
<u>Dolar Amerika Serikat</u>	
Tingkat bunga tetap	
INDOIS 2023	1 Maret/ March 1, 2023
INDON 2023	15 April/ April 15, 2023

9. GOVERNMENT BONDS (continued)

c. Based on maturity and interest rate (continued)

Suku Bunga/ Interest Rate	Description
	<u>Amortized cost (continued)</u>
	<u>Rupiah (continued)</u>
	Fixed interest rate
	Government Sharia Bond (continued)
6,42% tetap/ fixed	Sukuk BI
6,32% tetap/ fixed	Sukuk BI
6,46% tetap/ fixed	Sukuk BI
6,70% tetap/ fixed	Sukuk BI
6,47% tetap/ fixed	Sukuk BI
6,46% tetap/ fixed	Sukuk BI
6,70% tetap/ fixed	Sukuk BI
6,42% tetap/ fixed	Sukuk BI
6,30% tetap/ fixed	Sukuk BI
6,44% tetap/ fixed	Sukuk BI
6,47% tetap/ fixed	Sukuk BI
6,40% tetap/ fixed	Sukuk BI
6,32% tetap/ fixed	Sukuk BI
6,79% tetap/ fixed	Sukuk BI
6,40% tetap/ fixed	Sukuk BI
6,48% tetap/ fixed	Sukuk BI
6,71% tetap/ fixed	Sukuk BI
6,42% tetap/ fixed	Sukuk BI
6,39% tetap/ fixed	Sukuk BI
6,41% tetap/ fixed	Sukuk BI
6,40% tetap/ fixed	Sukuk BI
6,95% tetap/ fixed	Sukuk BI
6,42% tetap/ fixed	Sukuk BI
6,84% tetap/ fixed	Sukuk BI
6,40% tetap/ fixed	Sukuk BI
6,43% tetap/ fixed	Sukuk BI
7,02% tetap/ fixed	Sukuk BI
6,92% tetap/ fixed	Sukuk BI
	<u>United States Dollar</u>
	Fixed interest rate
3,75% tetap/ fixed	INDOIS 2023
3,38% tetap/ fixed	INDON 2023

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

9. OBLIGASI PEMERINTAH (lanjutan)

c. Berdasarkan jatuh tempo dan suku bunga (lanjutan)

Keterangan	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date
<u>Diukur pada biaya</u> <u>perolehan amortisasi (lanjutan)</u> <u>Dolar Amerika Serikat (lanjutan)</u> <u>Tingkat bunga tetap (lanjutan)</u>	
INDON 2023N	17 Oktober/ October 17, 2023
INDOIS 2024N	20 Agustus/ August 20, 2024
INDOIS 2024	10 September/ September 10, 2024
INDON 2025	15 Januari/ January 15, 2025
INDON 2026	8 Januari/ January 8, 2026

Bunga atas obligasi pemerintah syariah seri ORI, PBS dan seri SR, masing-masing dibayarkan secara bulanan dan semester.

Nilai pasar obligasi pemerintah yang diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui laba rugi dan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain berkisar dari 83,40% sampai dengan 128,61% dan 77,42% sampai dengan 120,93% masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

Kerugian yang belum direalisasi akibat penurunan nilai wajar obligasi pemerintah yang diukur pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar (Rp836.907) dan (Rp1.229.044), yang disajikan dalam akun "(Kerugian) yang belum direalisasi atas efek-efek dan obligasi pemerintah setelah pajak tangguhan" pada ekuitas dalam laporan posisi keuangan.

Bank mengakui keuntungan dan kerugian bersih atas penjualan obligasi pemerintah masing-masing sebesar Rp541.392 dan (Rp266.235), untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, yang disajikan dalam akun "Keuntungan dan (kerugian) dari penjualan obligasi pemerintah - neto" di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Bank mengakui keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi-neto atas perubahan nilai wajar obligasi pemerintah melalui laba rugi sebesar (Rp5.780) dan Rp55.045 masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, yang disajikan dalam akun "Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar obligasi pemerintah - neto" di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

9. GOVERNMENT BONDS (continued)

c. Based on maturity and interest rate (continued)

Suku Bunga/ Interest Rate	Description
	<u>Amortized cos (continued)</u> <u>United States Dollar (continued)</u> <u>Fixed interest rate (continued)</u>
5,38% tetap/ fixed	INDON 2023N
3,90% tetap/ fixed	INDON 2024N
4,35% tetap/ fixed	INDOIS 2024
4,13% tetap/ fixed	INDON 2025
4,75% tetap/ fixed	INDON 2026

Interest of ORI series, PBS and SR series sharia government bonds are paid monthly and semi-annually, respectively.

The market values of government bonds classified as fair value through profit or loss and fair value through other comprehensive income are ranging from 83.40% to 128.61% and 77.42% to 120.93% of nominal amounts as of December 31, 2023 and 2022, respectively.

As of December 31, 2023 and 2022, the unrealized gain or loss due to the decrease in the fair value of fair value through other comprehensive income government bonds (after deferred tax) amounted to (Rp836,907) and (Rp1,229,044), respectively, which are presented as "Unrealized (loss) on securities and government bonds, net of deferred tax" in the equity section of the statement of financial position.

The Bank recognized gain and loss-net on sale of government bonds amounting to Rp541,392 and (Rp266,235) for the years ended December 31, 2023 and 2022, respectively, which is presented in the statement of profit or loss and other comprehensive income as "Gain and (loss) on sale of government bonds - net".

The Bank recognized unrealized gain and loss-net from the change in fair value of government bonds classified as at fair value through profit or loss amounting to (Rp5,780) and Rp55,045 for the years ended December 31, 2023 and 2022, respectively, which is presented in the statement of profit and loss in other comprehensive income as "Unrealized gain and loss from change in fair value of government bonds - net".

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

10. EFEK-EFEK YANG DIBELI DENGAN JANJI DIJUAL KEMBALI

Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali terdiri dari:

10. SECURITIES PURCHASED UNDER AGREEMENT TO RESELL

Securities purchased under agreement to resell consist of:

31 Desember/December 31, 2022

Nasabah/ Customer	Jenis surat berharga/ Type of securities	Suku bunga/ Interest rate	Nilai nominal/ Nominal amount	Tanggal dimulai/ commencement date	Tanggal penjualan kembali/ Resell date	Harga Penjualan kembali/ Resell price	Pendapatan Bunga yang Belum Direalisasi/ Unrealized interest	Nilai tercatat/ Carrying Value
Pihak Ketiga/Third Party								
Bank Indonesia	VR0035	5,50%	1.000.000	30 Desember/ December 30, 2022	6 Januari/ January 6, 2023	957.562	731	956.831
Bank Indonesia	VR0039	5,50%	500.000	30 Desember/ December 30, 2022	6 Januari/ January 6, 2023	477.724	365	477.359
			1.500.000			1.435.286	1.096	1.434.190

Berikut adalah perubahan efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022:

Presented below is the movements in securities purchased under agreement to resell for the year ended December 31, 2023 and 2022, respectively:

31 Desember/December 31, 2023

	Stage 1	Stage 2	Stage 3	Syariah ^{*)}	Total	
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali						Securities purchased under agreement to resell
Saldo awal	1.434.190	-	-	-	1.434.190	Beginning Balance
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	-	-	-	-	-	New financial assets originated or purchased
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(1.434.190)	-	-	-	(1.434.190)	Derecognized financial assets
Saldo akhir tahun	-	-	-	-	-	Balance at the end of year

*) Tidak menerapkan PSAK No. 71 "Instrumen Keuangan"

*) Not applying SFAS No. 71 "Financial Instruments"

31 Desember/December 31, 2022

	Stage 1	Stage 2	Stage 3	Syariah ^{*)}	Total	
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali						Securities purchased under agreement to resell
Saldo awal	1.598.325	-	-	-	1.598.325	Beginning Balance
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	1.434.190	-	-	-	1.434.190	New financial assets originated or purchased
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(1.598.325)	-	-	-	(1.598.325)	Derecognized financial assets
Saldo akhir tahun	1.434.190	-	-	-	1.434.190	Balance at the end of year

*) Tidak menerapkan PSAK No. 71 "Instrumen Keuangan"

*) Not applying SFAS No. 71 "Financial Instruments"

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

11. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN/ PIUTANG SYARIAH

Seluruh kredit yang diberikan oleh Bank, termasuk pembiayaan/piutang syariah adalah dalam Rupiah. Rincian kredit dan pembiayaan/piutang syariah yang diberikan oleh Bank berdasarkan jenis, transaksi dengan pihak-pihak berelasi, sektor ekonomi, jangka waktu sesuai dengan perjanjian, sisa umur jatuh tempo dan kolektibilitas adalah sebagai berikut:

a. Jenis Kredit dan Pembiayaan/Piutang Syariah

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022
<u>Konvensional</u>		
Konsumsi		
Pemilikan rumah (KPR)	223.468.118	204.856.626
Non-kepemilikan rumah	12.840.107	11.546.141
	<u>236.308.225</u>	<u>216.402.767</u>
Modal kerja	35.696.992	32.155.119
Investasi	15.453.971	11.501.050
Sindikasi	7.150.361	4.504.244
Direksi dan karyawan		
- Pihak ketiga	1.893.632	2.008.080
- Pihak yang berelasi	80.679	86.305
	<u>296.583.860</u>	<u>266.657.565</u>
<u>Syariah</u>		
Konsumsi		
Pemilikan rumah (KPR)	34.602.763	29.030.428
Non-kepemilikan rumah	166.474	143.517
	<u>34.769.237</u>	<u>29.173.945</u>
Modal kerja	2.263.137	2.300.564
Investasi	78.036	142.572
Direksi dan karyawan		
- Pihak yang berelasi	3.871	7.058
	<u>37.114.281</u>	<u>31.624.139</u>
Total	333.698.141	298.281.704
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(15.591.964)	(15.674.923)
Neto	318.106.177	282.606.781

11. LOANS AND SHARIA FINANCING/ RECEIVABLES

All loans provided by the Bank, including sharia financing/receivables are in Rupiah. The details of loans and sharia financing/receivables classified by type, transactions with related parties, economic sector, period based on agreements, remaining period to maturity and collectibility are as follows:

a. Types of Loans and Sharia Financing/Receivables

<u>Conventional</u>
Consumer
Housing loan
Non-housing loan
Working capital
Investment
Syndicated
Directors and employees
Third parties -
Related parties -
<u>Sharia</u>
Consumer
Housing loan
Non-housing loan
Working capital
Investment
Directors and employees
Related parties -
Total
Less allowance
for impairment losses
Net

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

11. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN/
PIUTANG SYARIAH (lanjutan)

11. LOANS AND SHARIA FINANCING/
RECEIVABLES (continued)

b. Sektor Ekonomi

b. Economic Sector

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
<u>Konvensional</u>			<u>Conventional</u>
Perumahan	251.091.492	233.309.666	Property
Konstruksi	12.078.073	13.089.795	Construction
Jasa usaha	10.226.514	7.260.835	Business service
Listrik, gas dan air	5.106.305	3.368.130	Electricity, gas and water
Transportasi, pergudangan, dan komunikasi	4.830.547	4.414.947	Transportation, Warehousing, and communication
Perdagangan, restoran, dan hotel	4.117.417	1.410.821	Trading, restaurant and hotel
Pertambangan	1.842.962	1.228.096	Mining
Manufaktur	1.604.572	1.058.915	Manufacturing
Jasa-jasa sosial	1.542.949	1.148.943	Social service
Pertanian	177.819	52.234	Farming
Lain-lain ^{*)}	3.965.210	315.183	Other ^{*)}
	296.583.860	266.657.565	
<u>Syariah</u>			<u>Sharia</u>
Perumahan	34.604.291	29.035.910	Property
Konstruksi	1.597.691	1.466.466	Construction
Jasa usaha	912.299	1.121.763	Business service
	37.114.281	31.624.139	
Total	333.698.141	298.281.704	Total
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(15.591.964)	(15.674.923)	Less allowance for impairment losses
Neto	318.106.177	282.606.781	Net

*) Terdiri dari rumah tangga dan sektor ekonomi lainnya

*) Consists of household and other economic sectors

c. Kolektibilitas

c. Collectibility

	31 Desember/December 31, 2023		31 Desember/December 31, 2022		
	Nilai tercatat/ Carrying amount	Cadangan kerugian penurunan nilai/ Allowance for impairment losses	Nilai tercatat/ Carrying amount	Cadangan kerugian penurunan nilai/ Allowance for impairment losses	
<u>Konvensional</u>					<u>Conventional</u>
Individual					Individual
Lancar	8.399.059	1.916.967	6.349.613	1.487.285	Current
Dalam perhatian khusus	4.016.175	2.562.023	3.094.462	2.261.194	Special mention
Kurang lancar	113.803	96.719	210.002	43.087	Substandard
Diragukan	911	849	287.925	250.586	Doubtful
Macet	3.281.664	2.581.015	4.173.552	3.168.627	Loss
	15.811.612	7.157.573	14.115.554	7.210.779	
Kolektif					Collective
Lancar	255.215.275	3.570.880	233.227.549	4.086.908	Current
Dalam perhatian khusus	19.790.203	1.370.850	14.961.502	1.189.242	Special mention
Kurang lancar	279.523	97.243	223.217	48.405	Substandard
Diragukan	537.521	186.708	505.684	127.977	Doubtful
Macet	4.949.726	1.808.282	3.624.059	1.441.603	Loss
	280.772.248	7.033.963	252.542.011	6.894.135	
<u>Syariah</u>					<u>Sharia</u>
Lancar	33.636.263	75.269	28.499.767	197.833	Current
Dalam perhatian khusus	2.592.266	439.407	2.078.511	326.315	Special mention
Kurang lancar	177.947	177.947	146.997	146.997	Substandard
Diragukan	139.381	139.381	94.373	94.373	Doubtful
Macet	568.424	568.424	804.491	804.491	Loss
	37.114.281	1.400.428	31.624.139	1.570.009	
Total	333.698.141	15.591.964	298.281.704	15.674.923	Total

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

11. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN/
PIUTANG SYARIAH (lanjutan)

11. LOANS AND SHARIA FINANCING/
RECEIVABLES (continued)

d. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi

d. Transactions with related parties

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
<u>Konvensional</u>			<u>Conventional</u>
Konsumsi			Consumer
Pemilikan rumah (KPR)	4.176	4.538	Housing Loan
Non-kepemilikan rumah	85.559	91.185	Non-housing loan
	<u>89.735</u>	<u>95.723</u>	
Modal Kerja	12.066.600	8.884.001	Working capital
Investasi	9.340.394	6.728.046	Investment
Sindikasi	6.188.754	3.731.972	Syndicated
	<u>27.685.483</u>	<u>19.439.742</u>	
<u>Syariah</u>			<u>Sharia</u>
Konsumsi			Consumer
Pemilikan rumah (KPR)	1.529	5.483	Housing Loan
Non-kepemilikan rumah	2.342	1.575	Non-housing loan
	<u>3.871</u>	<u>7058</u>	
Modal Kerja	83.332	249.999	Working capital
	<u>87.203</u>	<u>257.057</u>	
Total	27.772.686	19.696.799	Total

e. Jangka waktu (sesuai dengan perjanjian kredit dan pembiayaan/piutang syariah)

e. Loan period (based on agreements covering loan and sharia financing/receivables)

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
<u>Konvensional</u>			<u>Conventional</u>
≤ 1 tahun	2.889.936	2.871.853	≤ 1 year
> 1 tahun ≤ 2 tahun	4.026.448	1.945.142	> 1 year ≤ 2 years
> 2 tahun ≤ 5 tahun	15.988.179	11.756.496	> 2 years ≤ 5 years
> 5 tahun	273.679.297	250.084.074	> 5 years
	<u>296.583.860</u>	<u>266.657.565</u>	
<u>Syariah</u>			<u>Sharia</u>
≤ 1 tahun	146.877	114.641	≤ 1 year
> 1 tahun ≤ 2 tahun	631.048	413.397	> 1 year ≤ 2 years
> 2 tahun ≤ 5 tahun	1.486.054	1.624.779	> 2 years ≤ 5 years
> 5 tahun	34.850.302	29.471.322	> 5 years
	<u>37.114.281</u>	<u>31.624.139</u>	
Total	333.698.141	298.281.704	Total
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(15.591.964)	(15.674.923)	Less allowance for impairment losses
Neto	318.106.177	282.606.781	Net

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

11. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN/
PIUTANG SYARIAH (lanjutan)

11. LOANS AND SHARIA FINANCING
/RECEIVABLES (continued)

f. Sisa Umur Jatuh Tempo

f. Remaining Period to Maturity

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
<u>Konvensional</u>			<u>Conventional</u>
≤ 1 tahun	14.044.527	15.001.990	≤ 1 year
> 1 tahun ≤ 2 tahun	8.528.139	6.996.578	> 1 year ≤ 2 years
> 2 tahun ≤ 5 tahun	29.474.735	25.171.528	> 2 years ≤ 5 years
> 5 tahun	244.536.459	219.487.469	> 5 years
	296.583.860	266.657.565	
<u>Syariah</u>			<u>Sharia</u>
≤ 1 tahun	861.160	1.033.295	≤ 1 year
> 1 tahun ≤ 2 tahun	858.624	979.616	> 1 year ≤ 2 years
> 2 tahun ≤ 5 tahun	2.325.080	1.831.707	> 2 years ≤ 5 years
> 5 tahun	33.069.417	27.779.521	> 5 years
	37.114.281	31.624.139	
Total	333.698.141	298.281.704	Total
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(15.591.964)	(15.674.923)	Less allowance for impairment losses
Neto	318.106.177	282.606.781	Net

g. Informasi pokok lainnya

g. Other significant information

i. Termasuk di dalam kredit yang diberikan
adalah pembiayaan/piutang syariah yang
diberikan dengan rincian sebagai berikut:

i. Loans include sharia financing/
receivables with details, as follows:

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
Piutang <i>Murabahah</i>	28.605.876	23.810.202	<i>Murabahah receivables</i>
Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	4.527.313	4.563.573	<i>Musyarakah financing</i>
Piutang <i>Istishna</i>	3.861.013	2.955.715	<i>Istishna receivables</i>
Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	102.689	284.162	<i>Mudharabah financing</i>
Pinjaman <i>Qardh</i>	15.940	10.487	<i>Funds of Qardh</i>
Aset yang Diperoleh Untuk <i>Ijarah – Bersih</i>	1.450	-	<i>Assets Acquired for Ijarah - Net</i>
Total	37.114.281	31.624.139	Total
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(1.400.428)	(1.570.009)	Less allowance for impairment losses
Neto	35.713.853	30.054.130	Net

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

11. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN/
PIUTANG SYARIAH (lanjutan)

11. LOANS AND SHARIA FINANCING/
RECEIVABLES (continued)

g. Informasi pokok lainnya (lanjutan)

g. Other significant information (continued)

- ii. Tingkat suku bunga rata-rata per tahun untuk kredit konsumen sebesar 9,66% dan 10,41% masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022. Tingkat suku bunga rata-rata per tahun untuk kredit komersial masing-masing sebesar 6,26% dan 6,54% masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

- ii. Average annual interest rates for consumer loans are 9.66% and 10.41% for the years ended December 31, 2023 and 2022, respectively. Average annual interest rates for commercial loans are 6.26% and 6.54% for the years ended December 31, 2023 and 2022, respectively.

- iii. Kredit yang diberikan dijamin dengan hak tanggungan atau surat kuasa memasang hak tanggungan atau surat kuasa untuk menjual, giro, tabungan, deposito berjangka atau jaminan lain yang umumnya diterima oleh Bank (Catatan 18, 19 dan 20).

- iii. The loans are collateralized by registered mortgages or by powers of attorney to mortgage or sell, demand deposits, savings deposits, time deposits, or by other collaterals generally acceptable by the Bank (Notes 18, 19 and 20).

- iv. Bank telah menjual dan mengalihkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang dimilikinya kepada penerbit PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) yang tertuang dalam Akta Jual Beli No. 48 tanggal 26 Oktober 2022 dan Akta Cessie No. 36 tanggal 23 Desember 2022.

- iv. The Bank has sold and transferred its housing loans (KPR) to PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) based on sale-purchase deed No. 48 dated October 26, 2022 and Deed of Cessie No. 36 dated December 23, 2022.

Nilai KPR yang dijual tersebut adalah sebesar Rp373.064 yang terdiri dari 5.475 debitur dengan harga jual sebesar nilai pokok KPR pada tanggal *cut-off* final (2 Oktober 2022). Penjualan ini memenuhi kriteria penjualan putus karena risiko dan manfaat atas kepemilikan KPR secara signifikan telah dialihkan kepada pembeli.

The principal amount of KPR sold amounted to Rp373,064 which consists of 5,475 debtors with selling price at the principal amount of KPR as of final cut off date (October 2, 2022). This sale qualified for derecognition as the risks and rewards of ownership over the KPR have been substantially transferred to the buyer.

- v. Bank telah menjual dan mengalihkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang dimilikinya kepada penerbit PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) yang tertuang dalam Akta Jual Beli No. 33 tanggal 28 Juli 2023 dan Akta Cessie No. 28 tanggal 26 September 2023.

- v. The Bank has sold and transferred its housing loans (KPR) to PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) based on sale-purchase deed No. 33 dated July 28, 2023 and Deed of Cessie No. 28 dated September 26, 2023.

Nilai KPR yang dijual tersebut adalah sebesar Rp599.359 yang terdiri dari 4.330 debitur dengan harga jual sebesar nilai pokok KPR pada tanggal *cut-off* final (4 Juli 2023). Penjualan ini memenuhi kriteria penjualan putus karena risiko dan manfaat atas kepemilikan KPR secara signifikan telah dialihkan kepada pembeli.

The principal amount of KPR sold amounted to Rp599,359 which consists of 4,330 debtors with selling price at the principal amount of KPR as of final cut off date (July 4, 2023). This sale qualified for derecognition as the risks and rewards of ownership over the KPR have been substantially transferred to the buyer.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

11. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN/
PIUTANG SYARIAH (lanjutan)

11. LOANS AND SHARIA FINANCING/
RECEIVABLES (continued)

g. Informasi pokok lainnya (lanjutan)

g. Other significant information (continued)

- vi. Pada tanggal 29 Desember 2023, Bank menjual kredit yang diberikan tertentu kepada PT AMC Padma Jaya ("AMC") sejumlah Rp872.378 dimana nilai tercatat bruto atas pokok adalah Rp860.503 dan tagihan bunga adalah Rp11.875. Bank sebelumnya telah membentuk cadangan kerugian penurunan nilai secara penuh sehingga nilai tercatatnya adalah Rpnil. Penjualan kredit yang diberikan ini dilakukan melalui akta jual beli dan cessie tertanggal 29 Desember 2023 dan sejak tanggal tersebut Bank menghentikan pengakuan kredit tersebut. Sesuai dengan ketentuan dalam akta jual beli dan cessie tersebut, Bank telah mengalihkan seluruh hak atas arus kas dan juga mengalihkan seluruh risiko dan manfaat atas kredit yang diberikan yang dijual tersebut. Oleh karena itu, Bank menghentikan pengakuan atas kredit yang diberikan ini dan mengakui pemulihan seluruh cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk sebelumnya.

- vi. On December 29, 2023, the Bank sold certain loans to PT AMC Padma Jaya ("AMC") in the amount of Rp872,378, where the gross carrying value of the principal was Rp860,503 and the interest receivable was Rp11,875. The bank had previously established a full allowance for impairment losses so that the carrying value was Rpnil. The sale of the credit granted was carried out through a sale and purchase deed and cessie dated December 29, 2023 and from that date the Bank stopped recognizing the credit. In accordance with the provisions of the sale and purchase deed and cessie, the Bank has transferred all rights to cash flows and also transferred all risks and benefits of the credit granted for sale. Therefore, the Bank derecognized this credit and recognized the recovery of all previously established allowances for impairment losses.

Pada tanggal yang sama, Bank membeli surat berharga syariah yaitu Sukuk Wakalah BI Al-Istitsmar ("Sukuk") yang diterbitkan oleh PT Angkasa Pura I (Persero) dari *Subsidiary of Enterprise* ("SOE") Wijayakusuma Fund dengan nilai sebesar Rp2.268.378. Sukuk ini telah dicatat pada nilai wajarnya sebesar Rp 1.465.100 pada tanggal pembelian (lihat Catatan 8 (Efek-Efek)). SOE Wijayakusuma Fund merupakan sub fund dari Namco Indonesia Raya VCC yang dikelola oleh Mandiri Investment Management Pte. Ltd. selaku manajer investasi. Pemegang mayoritas saham AMC adalah Raflesia Jaya Pte. Ltd. dengan kepemilikan sebesar 99,9%, dimana pemegang saham tunggal Raflesia Jaya Pte. Ltd. adalah Namco Indonesia Raya VCC. SOE Wijayakusuma dan AMC merupakan perusahaan terafiliasi. Bank tidak memiliki kepemilikan saham ataupun keterlibatan dalam aktivitas di dalam kedua entitas ini.

On the same date, the Bank purchased sharia securities, namely Sukuk Wakalah BI Al-Istitsmar ("Sukuk") issued by PT Angkasa Pura I (Persero) from the *Subsidiary of Enterprise* ("SOE") Wijayakusuma Fund with a value of Rp2,268,378. This sukuk has been recorded at its fair value of Rp1,465,100 at the date of purchase (see Note 8 (Securities)). SOE Wijayakusuma Fund is a sub fund of Namco Indonesia Raya VCC which is managed by Mandiri Investment Management Pte. Ltd. as investment manager. The majority shareholder of AMC is Raflesia Jaya Pte. Ltd. with ownership of 99.9%, where the sole shareholder is Raflesia Jaya Pte. Ltd. is Namco Indonesia Raya VCC. SOE Wijayakusuma and AMC are affiliated companies. The Bank does not have share ownership or involvement in activities in these two entities.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**11. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN/
PIUTANG SYARIAH (lanjutan)**

**11. LOANS AND SHARIA FINANCING/
RECEIVABLES (continued)**

g. Informasi pokok lainnya (lanjutan)

g. Other significant information (continued)

Mempertimbangkan transaksi pembelian sukuk dan penjualan kredit yang diberikan di atas dilakukan pada waktu yang sama dan dengan pihak-pihak lawan yang terafiliasi, Bank melihat transaksi-transaksi ini sebagai transaksi yang saling berkaitan sehingga dampak keuangan dari kedua transaksi diakui dalam akun beban penyisihan kerugian penurunan nilai aset keuangan dan aset non keuangan pada laporan laba rugi Bank pada tanggal transaksi.

Considering that the sukuk purchase and credit sales transactions provided above were carried out at the same time and with affiliated counterparties, the Bank views these transactions as interrelated transactions so that the financial impact of both transactions is recognized in the provision for impairment losses on financial and non-financial assets in the profit and loss statement Bank on the transaction date.

- vii. Kredit yang diberikan kepada direksi dan karyawan Bank merupakan kredit untuk membeli kendaraan dan keperluan pribadi lainnya yang dibebani bunga dengan suku bunga rata-rata pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar 6,01% dan 6,18%, dengan jangka waktu berkisar antara 1 sampai dengan 15 tahun. Kredit ini akan dibayar kembali melalui pemotongan gaji setiap bulan. Perbedaan antara tingkat bunga pinjaman karyawan dan *Base Lending Rate* (BLR) ditangguhkan dan dicatat sebagai beban yang ditangguhkan untuk pinjaman karyawan, bagian dari aset lain-lain. Besarnya akun beban yang ditangguhkan untuk pinjaman karyawan sebesar Rp400.702 dan Rp459.549 pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 (Catatan 16).

- vii. The loans given to the Bank's directors and employees consist of loans intended for purchase of vehicles and other personal necessities. These loans earn an average interest of 6.01% and 6.18%, for the year ended December 31, 2023 and 2022, with term ranging from 1 to 15 years. This loan will be repaid through employee deduction salary. Difference between employee loan's interest rates and Base Lending Rate (BLR) is deferred and recorded as deferred expense for employee loans as part of other assets. Deferred expense for employee loans amounted to Rp400,702 and Rp459,549 as of December 31, 2023 and 2022, respectively (Note 16).

- viii. Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah kepada pihak-pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp27.772.686 dan Rp19.696.799 (Catatan 43). Persentase kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah dari pihak-pihak berelasi terhadap jumlah kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar 8,32% dan 6,60%.

- viii. As of December 31, 2023 and 2022, the outstanding balances of loans and sharia financing/receivables from related parties amounted to Rp27,772,686 and Rp19,696,799, respectively (Note 43). As of December 31, 2023 and 2022, the percentage of loans and sharia financing/receivables from related parties represent approximately 8.32% and 6.60%, respectively, of the total loans and sharia financing/receivables.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

11. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN/ PIUTANG SYARIAH (lanjutan)

11. LOANS AND SHARIA FINANCING/ RECEIVABLES (continued)

g. Informasi pokok lainnya (lanjutan)

g. Other significant information (continued)

ix. Perubahan nilai tercatat dan cadangan kerugian penurunan nilai kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah adalah sebagai berikut:

ix. The movements in the gross carrying amount and allowance for impairment losses on loans and sharia financing/receivables are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
Saldo awal tahun	15.674.923	14.435.760	Balance at beginning of year
Penyisihan kerugian penurunan nilai selama tahun berjalan* (Catatan 33)	2.907.844	4.039.507	Provision for impairment losses during the year (Note 33)
Penerimaan kembali kredit yang telah dihapusbukukan	77.065	71.716	Recovery of loans written-off
Penghapusbukuan kredit	(3.067.868)	(2.872.060)	Loans written-off
Saldo akhir tahun	15.591.964	15.674.923	Balance at the end of year

*) Termasuk dampak nilai wajar sukuk sebesar Rp803.278 juta pada tahun 2023.

*) Included impact of fair value sukuk amounted Rp803,278 million in 2023.

Perubahan nilai tercatat bruto adalah sebagai berikut:

Movements in the gross carrying amount are as follows:

	31 Desember/December 31, 2023					
	Stage 1	Stage 2	Stage 3	Syariah ^{*)}	Total	
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah						Loans and sharia financing/receivables
Saldo Awal	220.360.764	28.662.115	17.634.686	31.624.139	298.281.704	Beginning Balance
Pengalihan ke:						Transfer to:
Stage 1	6.365.574	(6.168.358)	(197.216)	-	-	Stage 1
Stage 2	(13.235.646)	13.321.409	(85.763)	-	-	Stage 2
Stage 3	(4.641.382)	(1.297.379)	5.938.761	-	-	Stage 3
Total saldo awal setelah pengalihan	208.849.310	34.517.787	23.290.468	31.624.139	298.281.704	Total opening balance after transfer
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	(10.575.269)	(527.760)	(491.309)	(2.944.142)	(14.538.480)	Net remeasurement of carrying amount
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	61.107.511	104.446	1.528.461	9.244.792	71.985.210	New financial assets originated or purchased
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(16.016.044)	(702.994)	(1.800.346)	(443.041)	(18.962.425)	Derecognized financial assets
Aset keuangan yang dihapusbuku	(128.830)	(272.181)	(2.299.390)	(367.467)	(3.067.868)	Written-off financial assets
Total penambahan/(penurunan) tahun berjalan	34.387.368	(1.398.489)	(3.062.584)	5.490.142	35.416.437	Total addition/(reversal) during the year
Saldo akhir tahun	243.236.678	33.119.298	20.227.884	37.114.281	333.698.141	Balance at the end of year

*) Tidak menerapkan PSAK No. 71, "Instrumen Keuangan"

*) Not applying SFAS No. 71, "Financial Instruments"

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

11. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN/ PIUTANG SYARIAH (lanjutan)

11. LOANS AND SHARIA FINANCING/ RECEIVABLES (continued)

g. Informasi pokok lainnya (lanjutan)

g. Other significant information (continued)

ix. Perubahan nilai tercatat dan cadangan kerugian penurunan nilai kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah adalah sebagai berikut: (lanjutan)

ix. The movements in the gross carrying amount and allowance for impairment losses on loans and sharia financing/receivables are as follows: (continued)

Perubahan nilai tercatat bruto adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Movements in the gross carrying amount are as follows: (continued)

31 Desember/December 31, 2022						
	Stage 1	Stage 2	Stage 3	Syariah ^{*)}	Total	
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah						Loans and sharia financing/receivables
Saldo Awal	200.610.568	29.282.802	17.392.063	27.549.858	274.835.291	Beginning Balance
Pengalihan ke:						Transfer to:
Stage 1	10.127.196	(9.252.362)	(874.834)	-	-	Stage 1
Stage 2	(10.109.606)	10.556.294	(446.688)	-	-	Stage 2
Stage 3	(4.362.863)	(678.482)	5.041.345	-	-	Stage 3
Total saldo awal setelah pengalihan	196.265.295	29.908.252	21.111.886	27.549.858	274.835.291	Total opening balance after transfer
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	(9.599.191)	(513.843)	(387.887)	(1.924.831)	(12.425.752)	Net remeasurement of carrying amount
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	46.634.491	72.127	31.440	7.261.078	53.999.136	New financial assets originated or purchased
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(12.910.849)	(702.799)	(753.529)	(887.734)	(15.254.911)	Derecognized financial assets
Aset keuangan yang dihapus buku	(28.982)	(101.622)	(2.367.224)	(374.232)	(2.872.060)	Written-off financial assets
Total penambahan/(penurunan) tahun berjalan	24.095.469	(1.246.137)	(3.477.200)	4.074.281	23.446.413	Total addition/(reversal) during the year
Saldo akhir tahun	220.360.764	28.662.115	17.634.686	31.624.139	298.281.704	Balance at the end of year

*) Tidak menerapkan PSAK No. 71, "Instrumen Keuangan"

*) Not applying SFAS No. 71, "Financial Instruments"

Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

The movements in the allowance for impairment losses are as follows:

31 Desember/December 31, 2023						
	Stage 1	Stage 2	Stage 3	Syariah ^{*)}	Total	
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah						Loans and sharia financing/receivables
Saldo Awal	1.694.821	3.525.156	8.884.937	1.570.009	15.674.923	Beginning Balance
Pengalihan ke:						Transfer to:
Stage 1	624.497	(525.510)	(98.987)	-	-	Stage 1
Stage 2	(252.951)	300.934	(47.983)	-	-	Stage 2
Stage 3	(144.285)	(178.906)	323.191	-	-	Stage 3
Total saldo awal setelah pengalihan	1.922.082	3.121.674	9.061.158	1.570.009	15.674.923	Total opening balance after transfer
Pengukuran kembali bersih penurunan nilai	(432.700)	655.257	3.386.320	197.060	3.805.937	Net remeasurement of impairment losses
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	336.406	9.214	206.860	25.218	577.698	New financial assets originated or purchased
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(202.671)	(106.453)	(1.065.210)	(24.392)	(1.398.726)	Derecognized financial assets
Aset keuangan yang dihapus buku	(128.830)	(272.181)	(2.299.390)	(367.467)	(3.067.868)	Written-off financial assets
Total penambahan/(penurunan) tahun berjalan	(427.795)	285.837	228.580	(169.581)	(82.959)	Total addition/(reversal) during the year
Saldo akhir tahun	1.494.287	3.407.511	9.289.738	1.400.428	15.591.964	Balance at the end of year

*) Tidak menerapkan PSAK No. 71, "Instrumen Keuangan"

*) Not applying SFAS No. 71, "Financial Instruments"

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

11. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN/ PIUTANG SYARIAH (lanjutan)

11. LOANS AND SHARIA FINANCING/ RECEIVABLES (continued)

g. Informasi pokok lainnya (lanjutan)

g. Other significant information (continued)

ix. Perubahan nilai tercatat dan cadangan kerugian penurunan nilai kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah adalah sebagai berikut: (lanjutan)

ix. The movements in the gross carrying amount and allowance for impairment losses on loans and sharia financing/receivables are as follows: (continued)

Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut: (lanjutan)

The movements in the allowance for impairment losses are as follows: (continued)

31 Desember/December 31, 2022						
	Stage 1	Stage 2	Stage 3	Syariah ^{*)}	Total	
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah						Loans and sharia financing/receivables
Saldo Awal	1.209.325	2.309.833	9.646.739	1.269.863	14.435.760	Beginning Balance
Pengalihan ke:						Transfer to:
Stage 1	663.412	(499.909)	(163.503)	-	-	Stage 1
Stage 2	(53.917)	160.278	(106.361)	-	-	Stage 2
Stage 3	(28.068)	(175.118)	203.186	-	-	Stage 3
Total saldo awal setelah pengalihan	1.790.752	1.795.084	9.580.061	1.269.863	14.435.760	Total opening balance after transfer
Pengukuran kembali bersih penurunan nilai	(226.641)	1.887.803	2.066.364	477.724	4.205.250	Net remeasurement of impairment losses
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	300.732	4.698	15.139	238.053	558.622	New financial assets originated or purchased
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(141.040)	(60.807)	(409.403)	(41.399)	(652.649)	Derecognized financial assets
Aset keuangan yang dihapusbuku	(28.982)	(101.622)	(2.367.224)	(374.232)	(2.872.060)	Written-off financial assets
Total penambahan/(penurunan) tahun berjalan	(95.931)	1.730.072	(695.124)	300.146	1.239.163	Total addition/(reversal) during the year
Saldo akhir tahun	1.694.821	3.525.156	8.884.937	1.570.009	15.674.923	Balance at the end of year

^{*)} Tidak menerapkan PSAK No. 71, "Instrumen Keuangan"

^{*)} Not applying SFAS No. 71, "Financial Instruments"

Termasuk di dalam saldo cadangan kerugian adalah cadangan kerugian pembiayaan/piutang syariah sebesar Rp1.400.428 dan Rp1.570.009, masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

As of December 31, 2023 and 2022, the balance of allowance for impairment losses includes allowance for impairment losses on sharia financing/receivables amounting to Rp1,400,428 and Rp1,570,009, respectively.

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah yang dibentuk telah memadai.

Management believes that the amount of allowance for impairment losses on the loans and sharia financing/receivables is adequate.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

11. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN/ PIUTANG SYARIAH (lanjutan)

11. LOANS AND SHARIA FINANCING/ RECEIVABLES (continued)

g. Informasi pokok lainnya (lanjutan)

g. Other significant information (continued)

- x. Fungsi pengawasan kredit Bank berfokus pada pencegahan penurunan kualitas portofolio kredit dan aktivitas penyaluran kredit yang tidak sehat yang dapat mengakibatkan timbulnya kerugian. Risiko kredit dikelola dan diatasi dengan membuat pembatasan penyaluran kredit (*credit limit*) dan kebijakan penyaluran kredit yang seragam, melakukan pengawasan portofolio individual secara periodik dan pengukuran tingkat kolektibilitas portofolio kredit.
- xi. Dalam laporan Bank ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) disebutkan bahwa pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Bank telah mematuhi ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), baik terhadap pihak-pihak berelasi maupun kepada pihak yang tidak berelasi.
- xii. Rasio kredit dan pembiayaan/piutang syariah yang diklasifikasikan *non-performing* terhadap jumlah kredit dan pembiayaan/piutang syariah (metode *gross* dan *neto*) adalah seperti yang terlihat pada tabel berikut:

- x. The credit control function of the Bank focuses on preventing the deterioration of the quality of credit portfolio and unsound practices in granting credit facilities that may result in losses. Credit risks are managed by establishing credit limits and setting consistent lending policies, periodic monitoring of individual portfolio, and measuring the collectibility level of credit portfolio.
- xi. Based on the report submitted by the Bank to Financial Services Authority (OJK) as of December 31, 2023 and 2022, the Bank is in compliance with the legal lending limit (BMPK) regulations, both for the related and non-related party borrowers.
- xii. The ratios of non-performing loans and sharia financing/receivables to total loans and sharia financing/receivables (using the *gross* and *net* methods) are shown in the following table:

	31 Desember/December 31, 2023		31 Desember/December 31, 2022		
Kolektibilitas	Konvensional/ Conventional	Syariah/ Sharia	Konvensional/ Conventional	Syariah/ Sharia	Collectibility
Kurang Lancar	393.326	177.947	433.219	146.997	Substandard Doubtful Loss
Diragukan	538.432	139.381	793.609	94.373	
Macet	8.231.390	568.424	7.797.611	804.491	
	9.163.148	885.752	9.024.439	1.045.861	
Cadangan kerugian Penurunan nilai atas NPL/NPF	(4.770.816)	(885.752)	(5.080.285)	(1.045.861)	Allowance for impairment losses for NPL/NPF
	4.392.332	-	3.944.154	-	
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/ piutang syariah	<u>296.583.860</u>	<u>37.114.281</u>	<u>266.657.565</u>	<u>31.624.139</u>	Loans and sharia financing/ receivables
% Non-performing kredit yang diberikan dan pembiayaan/ piutang syariah - Gross (Gross NPL/NPF)	<u>3,09%</u>	<u>2,39%</u>	<u>3,38%</u>	<u>3,31%</u>	% of Non-performing loans and sharia financing/ receivables - Gross (Gross NPL/NPF)
% Non-performing kredit yang diberikan dan pembiayaan/ piutang syariah - Neto (Neto NPL/NPF)	<u>1,48%</u>	<u>0%</u>	<u>1,48%</u>	<u>0%</u>	% of Non-performing loans and sharia financing/ receivables - Net (Net NPL/NPF)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

11. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN/ PIUTANG SYARIAH (lanjutan)

11. LOANS AND SHARIA FINANCING/ RECEIVABLES (continued)

g. Informasi pokok lainnya (lanjutan)

g. Other significant information (continued)

- xiii. NPL/NPF Gross dihitung dengan membagi antara sindikasi jumlah kredit/pembiayaan/piutang syariah bermasalah dengan jumlah kredit/pembiayaan/piutang Syariah.

- xiii. The Gross NPL/NPF are computed by dividing the total non-performing loans/sharia financing/receivables by the total loans and sharia financing/receivables.

NPL/NPF Neto dihitung dengan membagi antara jumlah kredit/pembiayaan/piutang syariah bermasalah setelah dikurangi cadangan kerugian dan jumlah kredit/pembiayaan/piutang syariah keseluruhan.

The Net NPL/NPF ratios are computed by dividing the total non-performing loans/sharia financing/receivables, net of allowance for possible losses, by the total loans and sharia financing/receivables.

Rasio NPL/NPF Gross (total konvensional dan syariah) adalah 3,01% dan 3,38% masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

The Gross NPL/NPF Ratio (total conventional and sharia) is 3.01% and 3.38% as of December 31, 2023 and 2022, respectively.

Rasio NPL/NPF Neto (total konvensional dan syariah) adalah 1,32% dan 1,32% masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

The Net NPL/NPF Ratio (total conventional and sharia) is 1.32% and 1.32% as of December 31, 2023 and 2022, respectively.

- xiv. Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah *non-performing* berdasarkan sektor ekonomi:

- xiv. Non-performing loans and sharia financing/receivables by economic sectors:

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
<u>Konvensional</u>			<u>Conventional</u>
Perumahan	8.315.467	7.794.092	Property
Konstruksi	534.740	904.621	Construction
Jasa Usaha	191.925	79.417	Business service
Perdagangan, restoran dan hotel	87.920	173.739	Trading, restaurant and hotel
Pertambangan	14.147	15.397	Mining
Jasa-jasa sosial	11.676	28.436	Social service
Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi	2.058	6.387	Transportation, warehousing, and communication
Manufaktur	1.235	715	Manufacturing
Listrik, gas dan air	959	6.141	Electricity, gas and water
Pertanian	117	60	Farming
Lain-lain ^{*)}	2.904	15.434	Other ^{*)}
	9.163.148	9.024.439	
<u>Syariah</u>			<u>Sharia</u>
Perumahan	473.449	297.621	Property
Konstruksi	283.130	573.570	Construction
Jasa Usaha	129.173	174.670	Business service
	885.752	1.045.861	
Total	10.048.900	10.070.300	Total
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(5.656.568)	(6.126.146)	Less allowance for impairment losses
Neto	4.392.332	3.944.154	Net

^{*)} Terdiri dari rumah tangga dan sektor ekonomi lainnya

^{*)} Consists of household and other economic sectors

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

11. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN/
PIUTANG SYARIAH (lanjutan)

11. LOANS AND SHARIA FINANCING/
RECEIVABLES (continued)

g. Informasi pokok lainnya (lanjutan)

g. Other significant information (continued)

xv. Rasio kredit usaha kecil (KUK) terhadap total kredit adalah sebesar 0,8% dan 0,44% masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

xv. The ratio of small-scale enterprise loans to total loans is 0.8% and 0.44% as of December 31, 2023 and 2022, respectively.

xvi. Kredit sindikasi merupakan kredit yang diberikan kepada nasabah di bawah perjanjian pembiayaan bersama dengan bank-bank lain. Keikutsertaan Bank sebagai anggota sindikasi dengan persentase penyertaan sebesar 8,61% dan 7,62% dari jumlah kredit sindikasi masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

xvi. Syndicated loans represent loans provided to customers under syndication agreements with other banks. As of December 31, 2023 and 2022, the Bank's share as a co-lender in syndicated loans is 8.61% and 7.62% for each, respectively, of the total syndicated loans.

xvii. Kredit dan pembiayaan/piutang syariah yang direstrukturisasi berdasarkan kolektibilitas dan sektor ekonomi:

xvii. Restructured loans and sharia financing/receivables by collectibility and economic sector:

31 Desember/December 31, 2023

	Lancar/ Current	Dalam perhatian khusus/ Special mention	Kurang lancar/ Substandard	Diragukan/ Doubtful	Macet/ Loss	Total	
Perumahan	27.028.674	13.252.016	344.212	302.541	5.309.171	46.236.614	Property
Konstruksi	1.980.812	2.270.627	13.096	7.194	453.035	4.724.764	Construction
Jasa usaha	1.657.252	7.818	14.476	176	96.484	1.776.206	Business service
Perdagangan, restoran dan hotel	247.741	8.126	-	10.597	22.289	288.753	Trading, restaurant and hotel
Jasa-jasa sosial	101.841	21.709	-	-	10.091	133.641	Social services
Manufaktur	52	813	-	-	574	1.439	Manufacturing
Transportasi, pergudangan dan komunikasi	2.996.673	126.911	-	-	855	3.124.439	Transportation, warehousing and communication
Pertambangan	-	-	-	-	12.270	12.270	Mining
Lain-lain ^{*)}	13.596	1.410	-	-	254	15.260	Other ^{*)}
Total	34.026.641	15.689.430	371.784	320.508	5.905.023	56.313.386	Total

31 Desember/December 31, 2022

	Lancar/ Current	Dalam perhatian khusus/ Special mention	Kurang lancar/ Substandard	Diragukan/ Doubtful	Macet/ Loss	Total	
Perumahan	30.595.294	11.093.003	441.112	646.733	4.635.418	47.411.560	Property
Konstruksi	4.013.346	481.513	15.628	32.339	976.286	5.519.112	Construction
Jasa usaha	1.234.625	21.170	10.542	10.623	137.547	1.414.507	Business service
Perdagangan, restoran dan hotel	215.923	103.350	-	16	97.199	416.488	Trading, restaurant and hotel
Jasa-jasa sosial	105.371	25.335	302	-	17.854	148.862	Social services
Manufaktur	1.257	776	-	-	359	2.392	Manufacturing
Transportasi, pergudangan dan komunikasi	2.998.715	6.634	-	-	1.413	3.006.762	Transportation, warehousing and communication
Pertambangan	-	-	-	-	12.266	12.266	Mining
Pertanian	-	-	-	4	-	4	Farming
Lain-lain ^{*)}	15.199	1.432	397	134	12.413	29.575	Other ^{*)}
Total	39.179.730	11.733.213	467.981	689.849	5.890.755	57.961.528	Total

*) Terdiri dari rumah tangga dan sektor ekonomi lainnya

*) Consists of household and other economic sectors

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**11. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN/
PIUTANG SYARIAH (lanjutan)**

**11. LOANS AND SHARIA FINANCING/
RECEIVABLES (continued)**

g. Informasi pokok lainnya (lanjutan)

g. Other significant information (continued)

- xvii. Kredit dan pembiayaan/piutang syariah yang direstrukturisasi berdasarkan kolektibilitas dan sektor ekonomi: (lanjutan)

- xvii. Restructured loans and sharia financing/receivables by collectibility and economic sector: (continued)

Skema restrukturisasi yang disepakati oleh Bank dan debitur meliputi antara lain penjadwalan ulang pembayaran pokok kredit dan bunga, pembebasan tunggakan bunga, penurunan suku bunga, penambahan fasilitas kredit, novasi dan lain-lain.

Restructured loans scheme agreed by the Bank and its debtors include loans principal and interest rescheduling, overdue interest exemption, reduction of interest rates, additional loan facilities, novation and others.

Bank telah melakukan restrukturisasi kredit untuk debitur yang terdampak pandemi Covid-19 sesuai dengan POJK No. 11/POJK.03/2020 "Stimulus Perekonomian Nasional sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran Corona Virus Disease 2019" tertanggal 13 Maret 2020 dan perubahan POJK No. 48/POJK.03/2020 "Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran Corona Virus Disease 2019" tertanggal 1 Desember 2020 dan perubahan kedua POJK No. 17/POJK.03/2021 "Perubahan kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran Corona Virus Disease 2019" tertanggal 10 September 2021. Per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 total saldo kredit restrukturisasi Covid-19 masing-masing sebesar Rp25.663.629 dan Rp33.667.902.

Bank has restructured its credit for debtors affected by Covid-19 pandemic in accordance with POJK No.11/POJK.03/2020 "National Economic stimulus as countercyclical policy in the impact of the spread of Coronavirus Disease 2019" dated March 13, 2020 and amendment POJK No.48/POJK.03/2020 "Amendment of POJK No.11/POJK.03/2020 Regarding National Economic stimulus as countercyclical policy in the impact of the spread of Coronavirus Disease 2019" dated December 1, 2020 and second amendment POJK No.17/POJK.03/2021 "Second Amendment of POJK No.11/POJK.03/2020 Regarding National Economic stimulus as countercyclical policy in the impact of the spread of Coronavirus Disease 2019" dated September 10, 2021. As of December 31, 2023 and 2022 the total balance of Covid-19 restructure loans amounted to Rp25,663,629 and Rp33,667,902 respectively.

- xviii. Kredit yang telah dihapusbukukan oleh Bank dicatat sebagai kredit *off balance sheet* di dalam rekening administratif.

- xviii. The loans written-off by the Bank are recorded as off balance sheet in the administrative account.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**11. KREDIT YANG DIBERIKAN DAN PEMBIAYAAN/
PIUTANG SYARIAH (lanjutan)**

**11. LOANS AND SHARIA FINANCING/
RECEIVABLES (continued)**

g. Informasi pokok lainnya (lanjutan)

g. Other significant information (continued)

xix. Jumlah minimum cadangan kerugian penurunan nilai kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah, yang wajib dibentuk sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan adalah sebesar Rp12.641.044 dan Rp11.909.808, masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

xix. Minimum allowance for impairment losses for loans and sharia financing receivables required by Financial Services Authority amounted to Rp12,641,044 and Rp11,909,808 as of December 31, 2023 and 2022, respectively.

h. Informasi mengenai klasifikasi aset keuangan yang mengalami penurunan nilai dan tidak mengalami penurunan nilai dan kualitas kredit diungkapkan pada Catatan 46.

h. Information with respect to classification of impaired and not impaired and credit quality of financial assets are disclosed in Note 46.

12. TAGIHAN DAN LIABILITAS DERIVATIF

12. DERIVATIVE RECEIVABLE AND LIABILITIES

Bank BTN menerapkan akuntansi lindung nilai atas arus kas dengan tujuan untuk melindungi suatu instrumen atau kelompok instrumen dari eksposur variabilitas arus kas yang dapat diatribusikan pada risiko tertentu yang terkait dengan aset atau liabilitas yang diakui (seperti seluruh atau sebagian pembayaran bunga di masa depan atas utang dengan mata uang asing) atau yang dapat diatribusikan pada risiko tertentu yang terkait dengan prakiraan transaksi yang kemungkinan besar terjadi, dan dapat mempengaruhi laba rugi.

Bank BTN implemented hedge accounting of the cash flow with purpose to protect an instrument from exposure of cashflow variability that can be attributed at certain risk that related to acknowledge assets or liabilities (such as all or partial of future interest payment on foreign currency debt) or which can be attributed to certain risk that are most likely to occur and can affect profit or loss.

Pada tanggal 10 November 2022 dan 18 November 2022, Bank melakukan lindung nilai arus kas atas suku bunga dari obligasi subordinasi sebesar USD 300 juta (nilai penuh) dengan *Cross Currency Swap (CCS)*, dengan nilai nosional sebesar USD 72 juta (nilai penuh).

On November 10, 2022 and November 18, 2022, Bank entered into cashflow hedge for interest rate and principal of subordinated bond amounting to USD 300 milion (full amount) with cross currency swap (CCS), with notional value amount of USD 72 million (full amount).

Pada tanggal 28 Juli 2022 Bank melakukan lindung nilai arus kas atas suku bunga dan nilai pokok dari pinjaman korporasi Japan International Cooperation Agency (JICA) sebesar JPY 7 miliar (nilai penuh) dengan *Cross Currency Swap (CCS)*, dengan nilai nosional sebesar JPY 3 miliar (nilai penuh).

On July 28, 2022, Bank entered into cashflow hedge for interest rate and principal of corporate loan Japan International Corporate Agency (JICA) amounting to JPY 7 billion (full amount) with cross currency swap (CCS), with notional value amount of JPY 3 Billion (full amount).

Pada tanggal 24 Januari 2020 Bank melakukan lindung nilai arus kas atas suku bunga dan nilai pokok dari obligasi subordinasi sebesar USD 300 juta (nilai penuh) dengan *Cross Currency Swap*, dengan nilai nosional sebesar USD 150 juta (nilai penuh)

On January 24, 2020, Bank entered into cashflow hedge for interest rate and principal of Subordinated Bond amounting to USD 300 milion (full amount) with cross currency swap (CCS), with notional value amount of USD 150 million (full amount)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

12. TAGIHAN DAN LIABILITAS DERIVATIF
(lanjutan)

Perubahan nilai wajar dari kontrak CCS sebagai instrumen lindung nilai yang ditentukan sebagai lindung nilai yang efektif (yaitu bagian yang saling hapus) diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Setiap sisa keuntungan/kerugian atas instrumen lindung nilai (yaitu ketidakefektifan) untuk lindung nilai diakui dalam laba rugi.

Sejak dimulainya akuntansi lindung nilai arus kas tersebut, manajemen telah memiliki dokumentasi mengenai hubungan antara instrumen lindung nilai dan item yang dilindung nilai dan juga tujuan manajemen risikonya serta strategi dalam melakukan berbagai transaksi lindung nilai.

Dokumentasi juga meliputi penilaian efektivitas lindung nilai dari derivatif yang digunakan sebagai instrumen lindung nilai dan item yang dilindung nilai. Penilaian ini dilakukan baik pada permulaan lindung nilai tersebut diterapkan dan pada saat-saat berikutnya secara berkelanjutan.

12. DERIVATIVE RECEIVABLE AND LIABILITIES
(continued)

The changes of fair value of CCS contract as a hedging instrument that is designated as an effective hedge (that is, a part of set off) are recognized in other comprehensive income. The remaining gains/losses on the hedging instrument (ie. ineffectiveness) of the hedge, recognized in profit/loss.

Since the inception of the cashflow hedge accounting, management has documented the relationship between hedging instruments and hedged items as well as the objectives of risk management and strategies for engaging various hedging transaction.

The documentation also includes assessing the effectiveness of hedge from derivative that used as hedging instrument and hedged items. This assessment is carried out both at the beginning of the hedging applied and at later on an ongoing basis.

31 Desember/December 31, 2023

Tanggal Transaksi/ Transaction Date	Pihak ketiga/ Third Parties	Nosional/ Notional	Suku bunga yang dibayarkan/ Interest Paid	Suku bunga yang diterima/ Interest receivable	Jatuh tempo/ Maturity Date
27 Januari/ January 27, 2020	Standard Chartered Bank	USD25.000.000	8,30%	4,20%	23 Januari/ January 23, 2025
27 Januari/ January 27, 2020	Deutsche Bank AG	USD25.000.000	8,30%	4,20%	23 Januari/ January 23, 2025
10 November/ November 10, 2022	ANZ Bank	USD25.000.000	6,20%	4,20%	23 Januari/ January 23, 2025
10 November/ November 10, 2022	UOB Bank	USD25.000.000	6,20%	4,20%	23 Januari/ January 23, 2025
18 November/ November 18, 2022	Standard Chartered Bank	USD22.000.000	6,33%	4,20%	23 Januari/ January 23, 2025

31 Desember/December 31, 2022

Tanggal Transaksi/ Transaction Date	Pihak ketiga/ Third Parties	Nosional/ Notional	Suku bunga yang dibayarkan/ Interest Paid	Suku bunga yang diterima/ Interest receivable	Jatuh tempo/ Maturity Date
27 Januari/ January 27, 2020	Standard Chartered Bank	USD5.000.000	8,25%	4,20%	23 Januari/ January 23, 2023
27 Januari/ January 27, 2020	Standard Chartered Bank	USD25.000.000	8,30%	4,20%	23 Januari/ January 23, 2025
27 Januari/ January 27, 2020	Deutsche Bank AG	USD20.000.000	8,25%	4,20%	23 Januari/ January 23, 2023
27 Januari/ January 27, 2020	Deutsche Bank AG	USD25.000.000	8,30%	4,20%	3 Januari/ January 3, 2025
10 November/ November 10, 2022	ANZ Bank	USD25.000.000	6,20%	4,20%	23 Januari/ January 23, 2025
10 November/ November 10, 2022	UOB Bank	USD25.000.000	6,20%	4,20%	23 Januari/ January 23, 2025
18 November/ November 18, 2022	Standard Chartered Bank	USD22.000.000	6,33%	4,20%	23 Januari/ January 23, 2025
28 Juli/ July 28, 2022	ANZ Bank	JPY1.500.000.000	6,11%	0,90%	10 Mei/ May 10, 2023
28 Juli/ July 28, 2022	UOB Bank	JPY1.500.000.000	6,11%	0,90%	10 Mei/ May 10, 2023

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

12. TAGIHAN DAN LIABILITAS DERIVATIF
(lanjutan)

Selisih nilai wajar instrumen derivatif yang ditujukan sebagai lindung nilai arus kas dan kerugian selisih kurs atas obligasi subordinasi dalam mata uang asing dicatat pada penghasilan komprehensif lain masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022. Saldo kerugian tersebut sebesar Rp32.346 dan Rp49.301 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 disajikan sebagai "Bagian efektif lindung nilai arus kas" pada ekuitas.

Ringkasan transaksi derivatif sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022
Tagihan Derivatif		
Cross currency interest rate swap	32.176	103.939
Total	32.176	103.939

12. DERIVATIVE RECEIVABLE AND LIABILITIES
(continued)

The fair value difference of derivative instruments designated as cash flow hedges and loss on foreign exchange of subordinated bonds denominated in foreign currency were reported as other comprehensive income amounting to Rp32,346 and Rp49,301 as of December 31, 2023 and 2022, respectively. The amount is presented as "Effective portion of cashflow hedge" in equity.

The summary of the derivatives transaction as follow:

Derivative Receivable
Cross currency interest rate swap
Total

13. TAGIHAN AKSEPTASI

Rincian tagihan akseptasi kepada nasabah adalah sebagai berikut:

a. Berdasarkan Jenis dan Mata Uang

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022
<u>Pihak Berelasi</u>		
Surat Kredit Berdokumen		
Dalam Negeri (SKBDN)	68.746	131.356
<u>Pihak Ketiga</u>		
Surat Kredit Berdokumen		
Dalam Negeri (SKBDN)	475.821	282.045
Letter of Credit	-	7.161
Total	544.567	420.562
Cadangan kerugian penurunan nilai	(23.876)	(136)
Total	520.691	420.426

13. ACCEPTANCES RECEIVABLE

The details of acceptances receivable from customers are as follows:

a. By Type and Currency

<u>Related Parties</u>
Domestic Document Letter of Credit
<u>Third Parties</u>
Domestic Document Letter of Credit Letter of Credit
Total
Allowance for impairment losses
Total

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

13. TAGIHAN AKSEPTASI (lanjutan)

b. Berdasarkan Kolektibilitas

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, semua tagihan akseptasi diklasifikasikan sebagai lancar.

c. Berdasarkan Jangka Waktu

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022
≤ 1 bulan	362.394	80.697
> 1 bulan - 3 bulan	27.223	49.568
> 3 bulan - 1 tahun	154.950	290.297
Total	544.567	420.562

d. Nilai tercatat bruto dan cadangan kerugian penurunan nilai

Perubahan nilai tercatat bruto adalah sebagai berikut:

13. ACCEPTANCES RECEIVABLE (continued)

b. By Collectibility

All acceptances receivables were classified as current as of December 31, 2023 and 2022.

c. By Period

≤ 1 month
> 1 month - 3 months
> 3 months - 1 year

d. Gross carrying amount and allowance for impairment losses

Movements in the gross carrying amount are as follows:

31 Desember/December 31, 2023					
	Stage 1	Stage 2	Stage 3	Syariah ^{*)}	Total
Tagihan akseptasi					
Saldo Awal	420.562	-	-	-	420.562
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	488.494	56.073	-	-	544.567
Pembayaran kembali	(420.562)	-	-	-	(420.562)
Total penambahan/(penurunan) tahun berjalan	67.932	56.073	-	-	124.005
Saldo akhir tahun	488.494	56.073	-	-	544.567

Acceptances receivable
Beginning balance

New financial assets
originated or purchased
Repayment

Total addition/(reversal)

Balance at the end of year

*) Tidak menerapkan PSAK No. 71 "Instrumen Keuangan"

*) Not applying SFAS No. 71 "Financial Instruments"

31 Desember/December 31, 2022					
	Stage 1	Stage 2	Stage 3	Syariah ^{*)}	Total
Tagihan akseptasi					
Saldo Awal	454.140	-	-	-	454.140
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	420.562	-	-	-	420.562
Pembayaran kembali	(454.140)	-	-	-	(454.140)
Total penambahan/(penurunan) tahun berjalan	(33.578)	-	-	-	(33.578)
Saldo akhir tahun	420.562	-	-	-	420.562

Acceptances receivable
Beginning balance

New financial assets
originated or purchased
Repayment

Total addition/(reversal)

Balance at the end of year

*) Tidak menerapkan PSAK No. 71 "Instrumen Keuangan"

*) Not applying SFAS No. 71 "Financial Instruments"

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

13. TAGIHAN AKSEPTASI (lanjutan)

- d. Nilai tercatat bruto dan cadangan kerugian penurunan nilai (lanjutan)

Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

	31 Desember/December 31, 2023				
	Stage 1	Stage 2	Stage 3	Syariah ^{*)}	Total
Tagihan akseptasi					
Saldo awal	136	-	-	-	136
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	1.447	22.429	-	-	23.876
Pembayaran kembali	(136)	-	-	-	(136)
Total penambahan/(penurunan) tahun berjalan	1.311	22.429	-	-	23.740
Saldo akhir tahun	1.447	22.429	-	-	23.876

*) Tidak menerapkan PSAK No. 71 "Instrumen Keuangan"

13. ACCEPTANCES RECEIVABLE (continued)

- d. Gross carrying amount and allowance for impairment losses (continued)

The movements in the allowance for impairment losses are as follows:

Acceptances receivable
Beginning Balance

New financial assets originated or purchased
Repayment

Total addition/(reversal) during the year

Balance at the end of year

	31 Desember/December 31, 2022				
	Stage 1	Stage 2	Stage 3	Syariah ^{*)}	Total
Tagihan akseptasi receivable					
Saldo awal	623	-	-	-	623
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	136	-	-	-	136
Pembayaran kembali	(623)	-	-	-	(623)
Total penambahan/(penurunan) tahun berjalan	(487)	-	-	-	(487)
Saldo akhir tahun	136	-	-	-	136

*) Tidak menerapkan PSAK No. 71 "Instrumen Keuangan"

*) Not applying SFAS No. 71 "Financial Instruments"

Bank melakukan penilaian atas penurunan nilai tagihan akseptasi secara kolektif.

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian atas tagihan yang dibentuk telah memadai.

The Bank assessed acceptance receivables collectively for impairment.

The management believes that the allowance for impairment losses provided on acceptances receivable is adequate.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

14. ASET TETAP

Akun ini terdiri dari:

14. PREMISES AND EQUIPMENT

This account consists of:

31 Desember/December 31, 2023					
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Revaluasi/ Revaluation	Penambahan/ Reklasifikasi/ Additions/ Reclassifications	Pengurangan/ Reklasifikasi/ Deductions/ Reclassifications	Saldo Akhir/ Ending Balance
<u>Biaya/nilai revaluasi</u>					<u>Cost/revaluation value</u>
Tanah	4.406.143	57.208	84.830	-	4.548.181
Bangunan	1.730.187	-	130.748	-	1.860.935
Peralatan kantor dan kendaraan bermotor	3.673.813	-	437.474	-	4.111.287
	9.810.143	57.208	653.052	-	10.520.403
Aset dalam penyelesaian	69.685	-	1.684.492	(119.975)	1.634.202
	9.879.828	57.208	2.337.544	(119.975)	12.154.605
Aset hak guna	720.020	-	205.957	(126.836)	799.141
	10.599.848	57.208	2.543.501	(246.811)	12.953.746
<u>Akumulasi penyusutan</u>					<u>Accumulated depreciation</u>
Bangunan	862.248	-	75.928	-	938.176
Peralatan kantor dan kendaraan bermotor	3.007.502	-	413.946	-	3.421.448
	3.869.750	-	489.874	-	4.359.624
Aset hak guna	376.295	-	226.851	(126.836)	476.310
	4.246.045	-	716.725	(126.836)	4.835.934
Nilai Buku Neto	6.353.803				8.117.812
31 Desember/December 31, 2022					
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Revaluasi/ Revaluation	Penambahan/ Reklasifikasi ¹⁾ / Additions/ Reclassifications	Pengurangan/ Reklasifikasi/ Deductions/ Reclassifications	Saldo Akhir/ Ending Balance
<u>Biaya/nilai revaluasi</u>					<u>Cost/revaluation value</u>
Tanah	3.981.531	200.574	224.038	-	4.406.143
Bangunan	1.645.843	-	84.344	-	1.730.187
Peralatan kantor dan kendaraan bermotor	3.188.072	-	485.741	-	3.673.813
	8.815.446	200.574	794.123	-	9.810.143
Aset dalam penyelesaian	71.689	-	72.891	(74.895)	69.685
	8.887.135	200.574	867.014	(74.895)	9.879.828
Aset hak guna	581.520	-	253.379	(114.879)	720.020
	9.468.655	200.574	1.120.393	(189.774)	10.599.848
<u>Akumulasi penyusutan</u>					<u>Accumulated depreciation</u>
Bangunan	787.416	-	74.832	-	862.248
Peralatan kantor dan kendaraan bermotor	2.655.788	-	351.714	-	3.007.502
	3.443.204	-	426.546	-	3.869.750
Aset hak guna	288.660	-	202.514	(114.879)	376.295
	3.731.864	-	629.060	(114.879)	4.246.045
Nilai Buku Neto	5.736.791				6.353.803

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

14. ASET TETAP (lanjutan)

Jumlah penyusutan aset tetap yang dibebankan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp489.874 dan Rp426.546 (Catatan 34).

Nilai tercatat bruto dari aset tetap yang telah didepresiasi penuh oleh Bank namun masih digunakan masing-masing adalah sebesar Rp2.659.757 dan Rp2.359.401 pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

Hak atas tanah terdiri dari hak milik dan hak guna bangunan. Manajemen berpendapat bahwa jangka waktu hak atas tanah dapat diperbaharui atau diperpanjang kembali.

Bank telah mengasuransikan aset tetap kecuali tanah untuk menutup kemungkinan kerugian terhadap risiko kebakaran dan pencurian kepada PT Asuransi Bina Griya (pihak berelasi) pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp4.148.624 dan Rp4.565.947.

Persentase tingkat penyelesaian aset dalam penyelesaian masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebagai berikut:

31 Desember/December 31, 2023			
	Jumlah/ Amount	Kisaran persentase jumlah tercatat terhadap nilai kontrak penyelesaian/ Range percentage carrying amount to contract value	Kisaran persentase penyelesaian/ Range percentage of completion
Bangunan	1.404.028	0% - 57,70%	0% - 57,70%
Non Bangunan	230.174	5% - 95%	5% - 95%
			Building Non-Building
31 Desember/December 31, 2022			
	Jumlah/ Amount	Kisaran persentase jumlah tercatat terhadap nilai kontrak penyelesaian/ Range percentage carrying amount to contract value	Kisaran persentase penyelesaian/ Range percentage of completion
Bangunan	69.685	52,94% - 87%	52,94% - 87%
			Building

Penilaian atas tanah di tahun 2016 dilakukan oleh penilai independen eksternal KJPP Immanuel, Johnny, dan Rekan melalui laporannya pada tanggal 19 April 2016. Selanjutnya di tahun 2019, Bank melakukan penilaian kembali atas tanah yang dimiliki yang dilakukan oleh penilai independen eksternal KJPP Agus, Ali, Firdaus dan Rekan dengan laporan tertanggal 22 Oktober 2019. Bank melakukan penilaian kembali atas tanah yang dimiliki pada tahun 2022 yang dilakukan oleh penilai independen eksternal KJPP Aditya Iskandar dan Rekan dengan laporan tertanggal 12 Desember 2022 yang ditandatangani oleh penilai Aditya Iskandar Dwiattmaja.

14. PREMISES AND EQUIPMENT (continued)

Depreciation of premises and equipment and right of use asset charged to operations amounted to Rp489,874 and Rp426,546, for the year ended December 31, 2023 and 2022, respectively (Note 34).

The gross carrying amount of the Bank's fully depreciated premises and equipment that are still in use amounted to Rp2,659,757 and Rp2,359,401 as of December 31, 2023 and 2022, respectively.

Landrights consist of ownership rights and rights to use. Management has the opinion that the terms of the landrights can be renewed or extended upon their expiration.

The Bank insured its premises and equipment from losses due to risks of fire and theft to PT Asuransi Bina Griya (related party) on date December 31, 2023 and 2022 amounting to Rp4,148,624 and Rp4,565,947, respectively.

The percentage of completion of the constructions in progress as of December 31, 2023 and 2022:

The valuations of land in 2016 were performed by an external independent appraiser KJPP Immanuel, Johnny, dan Rekan through its report dated April 19, 2016. Next in 2019, the bank revalued its land which was done by an external independent appraiser KJPP Agus, Ali, Firdaus and Partners with its report dated October 22, 2019. The bank revalued its land in 2022 which was done by an external independent appraiser KJPP Aditya Iskandar and Partners with its report dated December 12, 2022 which signed by appraiser Aditya Iskandar Dwiattmaja.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

14. ASET TETAP (lanjutan)

Penilaian dilakukan sesuai dengan dan tunduk kepada ketentuan-ketentuan dari Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI) dan berdasarkan POJK No. 28/POJK.04/2021 tanggal 30 Desember 2021 tentang "Penyajian Laporan Penilaian Properti Di Pasar Modal" dan Standar Penilaian Indonesia, ditentukan berdasarkan transaksi pasar terkini dan dilakukan dengan ketentuan-ketentuan yang lazim.

Dalam pengukuran nilai wajar tanah, Penilai Independen memperhitungkan kemampuan peserta pasar untuk menghasilkan manfaat ekonomi dengan penggunaan tertinggi dan terbaik atas aset atau dengan menjual aset ke peserta pasar lain yang akan menggunakan aset pada kondisi tertinggi dan penggunaan terbaik. Metode penilaian yang digunakan oleh Penilai Independen adalah pendekatan pasar.

Informasi mengenai penilaian kembali aset tetap untuk kelompok aset tanah yang dilakukan Bank tahun 2016, 2019, 2022 adalah sebagai berikut:

14. PREMISES AND EQUIPMENT (continued)

The appraisal is carried out in accordance with and subject to the provisions of the Indonesian Appraiser Code of Ethics (KEPI) and based on POJK No. 28/POJK.04/2021 dated December 30, 2021 concerning "Presentation of Property Valuation Reports in the Capital Market" and Indonesian Valuation Standards, determined based on recent market transactions and carried out with customary provisions.

In the fair value measurement of the land, the Independent Appraisers takes into account a market participant's ability to generate economic benefits by using the assets in its highest and best use or by selling it to another market participant that would use the asset in its highest and best use. The valuation method used by the Independent Appraiser is market approach.

Information on the revaluation of land performed by the Bank in 2016, 2019, 2022 are as follows:

31 Desember/December 31, 2022				
	Nilai Buku sebelum Revaluasi/ Carrying Amount Before Revaluation	Nilai Buku setelah Revaluasi/ Carrying Amount after Revaluation	Keuntungan/(Kerugian) Revaluasi/ Gain/(Loss) on Revaluation	
Tanah	3.991.340	4.191.914	200.574	Land
31 Desember/December 31, 2019				
	Nilai Buku sebelum Revaluasi/ Carrying Amount Before Revaluation	Nilai Buku setelah Revaluasi/ Carrying Amount after Revaluation	Keuntungan/(Kerugian) Revaluasi/ Gain/(Loss) on Revaluation	
Tanah	3.635.660	3.970.391	334.731	Land
31 Desember/December 31, 2016				
	Nilai Buku sebelum Revaluasi/ Carrying Amount Before Revaluation	Nilai Buku setelah Revaluasi/ Carrying Amount after Revaluation	Keuntungan/(Kerugian) Revaluasi/ Gain/(Loss) on Revaluation	
Tanah	537.559	3.580.298	3.042.739	Land

Pada tahun 2023, Bank melakukan reklasifikasi atas properti terbengkalai yang memiliki nilai buku sebesar Rp25 dan melakukan pencatatan sebagai aset tetap. Pencatatan atas aset tetap tersebut berdasarkan hasil penilaian kembali yang dilakukan oleh Bank sesuai dengan nilai pasar aset. Penilaian Kembali yang dilakukan atas properti terbengkalai tersebut menghasilkan jumlah kenaikan tercatat sebesar Rp57.234 dimana kenaikan nilai tercatat yang timbul dari penilaian kembali dicatat sebagai "Surplus Revaluasi Aset Tetap", dan disajikan dalam penghasilan komprehensif lain sebesar Rp57.208.

In 2023, the Bank reclassified abandoned property which has a book value of Rp25 and recognised as a fixed asset. The recording of these fixed assets is based on the results of the revaluation carried out by the Bank according to the market value of the assets. The revaluation of the abandoned property resulted in an increase in the carrying amounting to Rp57,234, where the increase in the recorded value arising from the revaluation was recorded as "Fixed Asset Revaluation Surplus", and was presented in other comprehensive income amounting to Rp57,208.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

14. ASET TETAP (lanjutan)

Penilaian kembali yang dilakukan atas tanah pada tahun 2022 menghasilkan jumlah kenaikan nilai tercatat sebesar Rp200.574 yang tercatat pada "Penghasilan Komprehensif Lain". Sedangkan penilaian kembali yang dilakukan atas tanah pada tahun 2019, menghasilkan jumlah kenaikan nilai tercatat sebesar Rp334.731 yang terdiri dari kenaikan nilai tanah yang dicatat sebagai "Penghasilan Komprehensif Lain" sebesar Rp341.000 dan penurunan nilai tanah yang diakui sebagai beban tahun berjalan sebesar Rp6.269. Kenaikan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi tahun 2016 dicatat sebagai "Surplus Revaluasi Aset Tetap", dan disajikan dalam penghasilan komprehensif lain sebesar Rp3.042.739.

Pada tahun 2022 dan 2019, Bank melakukan penilaian kembali atas tanah tersebut bukan untuk tujuan perpajakan tetapi hanya untuk tujuan akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan.

Penilaian kembali tanah pada tahun 2016 adalah untuk tujuan perpajakan dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak dengan Surat Keputusan No. KEP-435/WPJ.19/2016 tanggal 8 Juni 2016. Jumlah pajak yang telah dibayar oleh Bank sehubungan penilaian kembali tersebut adalah sebesar Rp75.748.

Jika tanah dicatat sebesar harga perolehan, maka pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp970.795 dan Rp828.757.

Nilai wajar atas tanah termasuk pada hirarki nilai wajar level 3.

Tidak ada aset tetap yang dimiliki Bank yang dijadikan jaminan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat penurunan nilai aset tetap dan jumlah nilai pertanggungan asuransi cukup untuk menutup risiko kerugian yang mungkin timbul atas aset tetap pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

14. PREMISES AND EQUIPMENT (continued)

The revaluation of land in 2022, resulted in an increase in the carrying amount of land amounting to Rp200,574 which consists of the increase in the carrying amount of land recognised as "Other Comprehensive Income". However, the revaluation of land in 2019, resulted in an increase in the carrying amount of land amounting to Rp334,731 which consists of the increase in the carrying amount of land recognised as "Other Comprehensive Income" amounting to Rp341,000 and a decrease in carrying amount of land recognised in the current year expenses amounting to Rp6,269. Increase in the carrying amount arising from revaluation in 2016 is recorded in "Premises and Equipment Revaluation Surplus" and presented in other comprehensive income amounting to Rp3,042,739.

In 2022 and 2019, Bank has revalued the value of that land not for tax purpose rather for the accounting purpose according to the Financial Accounting Standard.

Revaluation of land in 2016, for tax purposes is performed after the approval from Directorate General of Tax through its letter No. KEP-435/WPJ.19/2016 dated June 8, 2016. The amount of tax which has been paid by the Bank in relation with the revaluation was amounting to Rp75,748.

If land is recorded at historical cost basis, the amount as of December 31, 2023 and 2022, would be Rp970,795 and Rp828,757.

The fair value of land included in the fair value hierarchy as level 3.

As of December 31, 2023 and 2022, there are no fixed assets owned by the Bank which are pledged as collateral.

Management believes that there is no impairment in value of premises and equipments and the amount of insurance coverage is adequate to cover the risk of loss that may arise on the premises and equipments as of December 31, 2023 and 2022.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

14. ASET TETAP (lanjutan)

Bank menyewa beberapa aset termasuk bangunan, rumah dinas, lahan ATM, kendaraan mobil, jaringan, mesin ATM, dan media promosi. Rata-rata masa sewa adalah 4 tahun.

Bank mempunyai sewa tertentu dengan masa sewa 12 bulan atau kurang dan sewa bernilai rendah. Bank menerapkan pengecualian pengakuan sewa jangka pendek dan sewa bernilai rendah untuk sewa tersebut.

Nilai tercatat untuk aset hak guna adalah sebagai berikut:

14. PREMISES AND EQUIPMENT (continued)

The Bank leases several assets including buildings, official residences, ATM space, car, network, ATM machine, and promotional media. The average lease term is 4 years.

The Bank also has certain leases with lease terms of 12 months or less and low value assets. The Bank applies the recognition exemptions of short-term leases and low-value assets for these leases.

The carrying amount of right of use assets are as follows:

31 Desember/December 31, 2023					
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions/	Pengurangan/ Deductions/	Saldo Akhir/ Ending Balance	
<u>Nilai tercatat</u>					<u>Carrying amount</u>
Bangunan	565.724	118.767	(102.407)	582.084	Buildings
Kendaraan	146.319	87.190	(16.570)	216.939	Vehicle
Mesin ATM	7.839	-	(7.839)	-	ATM Machine
Lainnya	138	-	(20)	118	Others
	720.020	205.957	(126.836)	799.141	
<u>Akumulasi penyusutan</u>					<u>Accumulated depreciation</u>
Bangunan	297.729	151.095	(102.407)	346.417	Buildings
Kendaraan	72.237	74.108	(16.569)	129.776	Vehicle
Mesin ATM	6.196	1.643	(7.839)	-	ATM Machine
Lainnya	133	4	(20)	117	Others
	376.295	226.850	(126.835)	476.310	
Nilai Buku Neto	343.725			322.831	Net Book Value
31 Desember/December 31, 2022					
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions/	Pengurangan/ Deductions/	Saldo Akhir/ Ending Balance	
<u>Nilai tercatat</u>					<u>Carrying amount</u>
Bangunan	514.000	137.542	(85.818)	565.724	Buildings
Kendaraan	59.433	115.837	(28.951)	146.319	Vehicle
Mesin ATM	7.839	-	-	7.839	ATM Machine
Lainnya	248	-	(110)	138	Others
	581.520	253.379	(114.879)	720.020	
<u>Akumulasi penyusutan</u>					<u>Accumulated depreciation</u>
Bangunan	236.048	147.499	(85.818)	297.729	Buildings
Kendaraan	47.345	53.843	(28.951)	72.237	Vehicle
Mesin ATM	5.074	1.122	-	6.196	ATM Machine
Lainnya	193	50	(110)	133	Others
	288.660	202.514	(114.879)	376.295	
Nilai Buku Neto	292.860			343.725	Net Book Value

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

15. BUNGA YANG MASIH AKAN DITERIMA

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022
Kredit yang diberikan	10.991.199	10.165.322
Obligasi pemerintah	406.144	385.556
Efek-efek dan penempatan pada bank lain	93.842	170.468
Derivatif	35.502	28.956
Total	11.526.687	10.750.302

15. INTERESTS RECEIVABLES

This account consists of:

Loans
Government bonds
Securities and placement with other Banks
Derivative
Total

16. ASET LAIN-LAIN

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022
<u>Pihak ketiga</u>		
Tagihan kepada pihak ketiga	1.873.496	1.040.048
Biaya dibayar dimuka	698.200	505.346
Beban yang ditangguhkan untuk pinjaman karyawan (Catatan 11g)	400.702	459.549
Agunan yang diambil alih	77.591	77.591
Lainnya	185.057	270.228
Total	3.235.046	2.352.762

16. OTHER ASSETS

This account consists of:

<u>Third party</u>
Third party receivables
Prepaid expenses
Deferred expense for employee loan (Note 11g)
Foreclosed collateral
Others
Total

Tagihan kepada pihak ketiga merupakan tagihan kepada nasabah dan pihak lainnya seperti tagihan kepada Pemerintah Republik Indonesia (Perumpera), tagihan kepada PT Pos Indonesia (Persero) sehubungan dengan kerja sama penyelenggaraan Tabungan Batara Kantor Pos, serta tagihan kepada PT Artajasa terkait dengan transaksi ATM Bersama, PT Finnet Indonesia atas transaksi ATM Link, PT Alto Network atas transaksi ATM Alto, dan PT Rintis Sejahtera atas transaksi ATM Prima.

Rincian biaya dibayar dimuka terutama terdiri dari biaya sewa dan biaya pemeliharaan gedung dan peralatan kantor.

Third party receivables represent receivables from customers and other parties such as the receivables from the Government of the Republic of Indonesia, (Perumpera) receivables from PT Pos Indonesia (Persero) regarding collaboration on holding Tabungan Batara Kantor Pos, and receivables from PT Artajasa arising from transactions with ATM Bersama, receivables from PT Finnet Indonesia arising from ATM Link's transactions, receivables from PT Alto Network arising from transaction with ATM Alto, and receivables from PT Rintis Sejahtera arising from transaction with ATM Prima.

Details of prepaid expenses consist mainly of rent expenses and building and office furnitures maintenance expenses.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

17. LIABILITAS SEGERA

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022
Kewajiban kepada pihak ketiga	2.384.802	2.534.231
Hutang pajak		
Pajak penghasilan		
Pasal 29 (Catatan 38)	345.514	347.774
Pasal 4 ayat (2)	157.517	122.810
Pasal 21	95.946	88.045
Pajak pertambahan nilai	90.810	32.567
Deposito berjangka jatuh tempo	90.263	14.058
Bagi hasil yang belum dibagikan	84.951	37.548
Bunga atas deposito berjangka		
yang belum diambil nasabah	7.255	2.634
Lainnya	20.456	25.691
Total	3.277.514	3.205.358

17. LIABILITIES DUE IMMEDIATELY

This account consists of:

Third party payables
Taxes payable
Income tax
Article 29 (Note 38)
Article (4) paragraph 2
Article 21
Value added tax
Matured time deposits
Undistributed profit sharing
Interest on time deposits which is
not yet collected by customers
Others
Total

18. GIRO

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember/ December 31, 2023		31 Desember/ December 31, 2022	
	Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount in foreign currencies (angka penuh/ full amount)	Ekuivalen/ Equivalent Rupiah	Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount in foreign currencies (angka penuh/ full amount)	Ekuivalen/ Equivalent Rupiah
Pihak ketiga				
Rupiah		23.347.492		19.411.404
Dolar Amerika Serikat	793.608	12.219	527.470	8.211
		23.359.711		19.419.615
Pihak Berelasi (Catatan 43)				
Rupiah		101.003.321		92.304.844
Dolar Amerika Serikat	1.198.007.695	18.445.724	115.706.948	1.801.268
		119.449.045		94.106.112
Total		142.808.756		113.525.727

18. DEMAND DEPOSITS

This account consists of:

Third parties
Rupiah
United States Dollar
Related parties (Note 43)
Rupiah
United States Dollar
Total

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, saldo giro termasuk giro yang didasarkan pada prinsip perbankan syariah adalah masing-masing sebesar Rp13.439.465 dan Rp8.624.809.

As of December 31, 2023 and 2022, demand deposits balance include deposits based on sharia banking principles amounting to Rp13,439,465 and Rp8,624,809, respectively.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

18. GIRO (lanjutan)

Tingkat suku bunga rata-rata untuk giro Rupiah adalah sebesar 2,21% dan 1,59% masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, dan tingkat suku bunga rata-rata untuk giro Dolar Amerika Serikat adalah sebesar 4,51% dan 1,03% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

Giro yang digunakan sebagai jaminan atas fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp438.578 dan Rp354.287 (Catatan 11).

Giro simpanan dari nasabah dan wadiah dari pihak-pihak berelasi pada 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp119.449.045 dan Rp94.106.112 (Catatan 43).

Pada tahun 2023, telah dilakukan migrasi dana jaminan ke rekening giro escrow per masing-masing pengembang/nasabah sebesar Rp3.044.849. Sebelumnya, dana jaminan ini dicatat pada akun liabilitas lain-lain. Kemudian atas akad kredit baru di akhir tahun 2023, Bank mencatat seluruh dana jaminan pada rekening giro escrow per masing-masing pengembang/nasabah. Pada tanggal 31 Desember 2023, saldo dana jaminan yang terdapat pada rekening giro escrow sebesar Rp3.738.754.

Dana Syirkah Temporer - Giro Mudharabah

a. Berdasarkan jenis produk

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022
Giro BTN Prima iB	726.061	480.787
Total	726.061	480.787

b. Berdasarkan hubungan

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022
Pihak Ketiga	712.587	468.890
Pihak Berelasi (Catatan 43)	13.474	11.897
Total	726.061	480.787

Nisbah dan tingkat bagi hasil rata-rata untuk giro Mudharabah untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	2023	
	Nisbah (%)/ Ratio (%)	Tingkat bagi hasil (%)/ Profit sharing rate (%)
Giro Mudharabah	12,70 : 87,30	1,28%

18. DEMAND DEPOSITS (Continued)

The average annual interest rates for Rupiah demand deposits are 2.21% and 1.59% for the year ended December 31, 2023, and 2022, respectively, and for United States Dollar denominated demand deposits are 4.51% and 1.03% for the year ended December 31, 2023 and 2022, respectively.

Demand deposits amounting to Rp438,578 and Rp354,287 as of December 31, 2023 and 2022, respectively, are pledged as collateral for loans provided by the Bank (Note 11).

As of December 31, 2023 and 2022, demand deposit and wadiah demand deposits from depositors who are related parties of the bank amounted to Rp119,449,045 and Rp94,106,112 (Note 43).

In 2023, the security deposits were migrated to the escrow demand deposits per each developer amounted to Rp3,044,849. Previously, the security deposits were recorded in other liabilities account. Afterwards, the new credit agreement at the end of 2023, the Bank will record all security deposits in the escrow demand deposits per each developer. As of December 31, 2023, the security deposits balance in the escrow demand deposits was amounted to Rp3,738,754.

Temporary Syirkah Funds - Mudharabah Current Accounts

a. By product

Giro BTN Prima iB
Total

b. By relationship

Third Parties
 Related Party (Note 43)
Total

The average rate of ratio and profit sharing for Mudharabah current accounts for the year ended December 31, 2023 and 2022 are as follows:

Mudharabah current accounts

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

18. GIRO (lanjutan)

Dana Syirkah Temporer - Giro Mudharabah (lanjutan)

Nisbah dan tingkat bagi hasil rata-rata untuk giro Mudharabah untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

	2022
	Nisbah (%)/ Ratio (%)
Giro Mudharabah	14 : 86
Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 tidak terdapat giro mudharabah yang dijadikan jaminan.	

18. DEMAND DEPOSITS (continued)

Temporary Syirkah Funds - Mudharabah Current Accounts (continued)

The average rate of ratio and profit sharing for Mudharabah current accounts for the year ended December 31, 2023 and 2022 are as follows: (continued)

	Tingkat bagi hasil (%)/ Profit sharing rate (%)	
Mudharabah current accounts	1,37%	
As of December 31, 2023 and 2022, there are no mudharabah demand deposits which are pledged as collateral.		

19. TABUNGAN

	31 Desember/ December 31, 2023	
	Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount in foreign currencies (angka penuh/ full amount)	Ekuivalen/ Equivalent Rupiah
<u>Rupiah</u>		
Tabungan Batara		37.557.013
Tabungan Batara Wadiah		1.276.592
		38.833.605
<u>Dolar Amerika Serikat</u>		
Tabungan Batara	8.712.221	134.142
<u>Dolar Singapura</u>		
Tabungan Batara	2.655.444	31.006
		165.148
Total		38.998.753

19. SAVINGS DEPOSITS

	31 Desember/ December 31, 2022		
	Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount in foreign currencies (angka penuh/ full amount)	Ekuivalen/ Equivalent Rupiah	
<u>Rupiah</u>			
Batara savings deposits		36.079.695	
Batara Wadiah savings deposit		1.193.718	
		37.273.413	
<u>United States Dollar</u>			
Batara savings deposits	6.211.491	96.697	
<u>Singapore Dollar</u>			
Batara savings deposits	512.114	5.937	
		102.634	
Total		37.376.047	Total

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, saldo tabungan termasuk tabungan yang didasarkan pada prinsip perbankan syariah masing-masing sebesar Rp1.276.592 dan Rp1.193.718.

Tingkat suku bunga rata-rata untuk tabungan rupiah sebesar 1,53% dan 1,44% masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022. Tingkat suku bunga rata-rata untuk tabungan valas sebesar 0,21% dan 0,16% masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

As of December 31, 2023 and 2022, savings deposits balance include savings deposits based on sharia banking principles amounted to Rp1,276,592 and Rp1,193,718, respectively.

The average annual interest rates for rupiah savings deposits are 1.53% and 1.44%, for the year ended December 31, 2023 and 2022, respectively. The average annual interest rates for foreign currencies savings deposits are 0.21% and 0.16%, for the year ended December 31, 2023 and 2022, respectively.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

19. TABUNGAN (lanjutan)

Tabungan yang digunakan sebagai jaminan atas fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp594.105 dan Rp598.326 (Catatan 11).

Tabungan Batara dan wadiah dari pihak-pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp694.298 dan Rp526.282 (Catatan 43).

Dana Syirkah Temporer - Tabungan Mudharabah

a. Berdasarkan jenis produk

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022
<u>Rupiah</u>		
Tabungan BTN Prima iB	5.214.570	4.602.505
Tabungan BTN Haji & Umroh iB	245.314	205.866
Tabungan BTN Emas iB	7.266	6.006
Tabungan Qurban BTN iB	6.092	4.736
Total	5.473.242	4.819.113

b. Berdasarkan hubungan

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022
Pihak Ketiga	5.331.275	4.730.686
Pihak Berelasi (Catatan 43)	141.967	88.427
Total	5.473.242	4.819.113

Tabungan *Mudharabah* merupakan simpanan dana pihak lain yang mendapatkan imbalan bagi hasil dari pendapatan Bank atas penggunaan dana tersebut dengan *nisbah* yang ditetapkan dan disetujui sebelumnya.

Nisbah dan tingkat bagi hasil rata-rata untuk tabungan *Mudharabah* untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	2023	
	<i>Nisbah (%)</i> Ratio (%)	Tingkat bagi hasil (%) Profit sharing rate (%)
Tabungan BTN Prima iB	34,10 : 65,90	3,42%
Tabungan BTN Haji & Umroh iB	2 : 98	0,20%
Tabungan Qurban BTN iB	15,50 : 84,50	1,55%
Tabungan BTN Emas iB	25 : 75	2,50%

19. SAVINGS DEPOSITS (continued)

Savings deposits amounting to Rp594,105 and Rp598,326 as of December 31, 2023 and 2022, respectively, are pledged as collateral for loans provided by the Bank to its customers (Note 11).

As of December 31, 2023 and 2022, Batara and wadiah savings deposits from depositors who are related parties of the Bank amounted to Rp694,298 and Rp526,282, respectively (Note 43).

Temporary Syirkah Funds - Mudharabah Savings Deposits

a. By product

<u>Rupiah</u>
Tabungan BTN Prima iB
Tabungan BTN Haji & Umroh iB
Tabungan BTN Emas iB
Tabungan Qurban BTN iB
Total

b. By relationship

Third Parties
Related Party (Note 43)
Total

Mudharabah savings deposits represent deposits from third parties who receive a share in the revenue derived by the Bank from the use of such funds based on a pre-determined and pre-agreed ratio.

The average rate of ratio and profit sharing for *Mudharabah* savings deposits for the year ended December 31, 2023 and 2022 are as follows:

Tabungan BTN Prima iB
Tabungan BTN Haji & Umroh iB
Tabungan Qurban BTN iB
Tabungan BTN Emas iB

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

19. TABUNGAN (lanjutan)

Dana Syirkah Temporer - Tabungan Mudharabah (lanjutan)

Nisbah dan tingkat bagi hasil rata-rata untuk tabungan Mudharabah untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

	2022	
	Nisbah (%)/ Ratio (%)	Tingkat bagi hasil (%)/ Profit sharing rate (%)
Tabungan BTN Prima iB	10,50 : 89,50	1,03%
Tabungan BTN Haji & Umroh iB	15,50 : 84,50	1,52%
Tabungan Qurban BTN iB	15,50 : 84,50	1,52%
Tabungan BTN Emas iB	25 : 75	2,44%

Tabungan BTN Prima iB
 Tabungan BTN Haji & Umroh iB
 Tabungan Qurban BTN iB
 Tabungan BTN Emas iB

20. DEPOSITO BERJANGKA

a. Tingkat suku bunga rata-rata per tahun untuk deposito berjangka adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022
<u>Rupiah</u>		
1 bulan	4,19%	2,86%
3 bulan	4,93%	3,13%
6 bulan	4,71%	3,13%
12 bulan	3,59%	3,03%
24 bulan	4,96%	4,51%
Mata uang asing	4,25%	0,36%

b. Rincian deposito berjangka berdasarkan mata uang dan jangka waktu kontrak:

	31 Desember/ December 31, 2023		31 Desember/ December 31, 2022	
	Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount in foreign currencies (angka penuh/ full amount)	Ekuivalen/ Equivalent Rupiah	Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount in foreign currencies (angka penuh/ full amount)	Ekuivalen/ Equivalent Rupiah
<u>Rupiah</u>				
1 bulan	42.852.585		49.859.586	
3 bulan	53.384.291		49.971.583	
6 bulan	19.375.655		23.370.744	
12 bulan	18.032.209		10.416.465	
24 bulan	285.408		11.553.056	
	133.930.148		145.171.434	
<u>Dolar Amerika Serikat</u>				
1 bulan	56.059.161	863.143	2.448.639	38.119
3 bulan	244.021.914	3.757.205	56.778.006	883.892
6 bulan	137.882.149	2.122.971	5.083.726	79.141
12 bulan	287.521	4.427	473.642	7.373
	6.747.746		1.008.525	
<u>Dolar Singapura</u>				
1 bulan	186.901	2.182	104.900	1.216
3 bulan	1.161.570	13.563	453.603	5.259
6 bulan	-	-	1.000.000	11.593
	15.745		18.068	
Total	140.693.639		146.198.027	

19. SAVINGS DEPOSITS (continued)

Temporary Syirkah Funds - Mudharabah Savings Deposits (continued)

The average rate of ratio and profit sharing for Mudharabah savings deposits for the year ended December 31, 2023 and 2022 are as follows: (continued)

20. TIME DEPOSITS

a. Average annual interest rates for time deposits are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022
<u>Rupiah</u>		
1 bulan	4,19%	2,86%
3 months	4,93%	3,13%
6 months	4,71%	3,13%
12 months	3,59%	3,03%
24 months	4,96%	4,51%
Foreign currencies	4,25%	0,36%

b. The details of time deposits by currency and contract period are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2023		31 Desember/ December 31, 2022	
	Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount in foreign currencies (angka penuh/ full amount)	Ekuivalen/ Equivalent Rupiah	Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount in foreign currencies (angka penuh/ full amount)	Ekuivalen/ Equivalent Rupiah
<u>Rupiah</u>				
1 month	42.852.585		49.859.586	
3 months	53.384.291		49.971.583	
6 months	19.375.655		23.370.744	
12 months	18.032.209		10.416.465	
24 months	285.408		11.553.056	
	133.930.148		145.171.434	
<u>United States Dollar</u>				
1 month	56.059.161	863.143	2.448.639	38.119
3 months	244.021.914	3.757.205	56.778.006	883.892
6 months	137.882.149	2.122.971	5.083.726	79.141
12 months	287.521	4.427	473.642	7.373
	6.747.746		1.008.525	
<u>Singapore Dollar</u>				
1 months	186.901	2.182	104.900	1.216
3 months	1.161.570	13.563	453.603	5.259
6 months	-	-	1.000.000	11.593
	15.745		18.068	
Total	140.693.639		146.198.027	

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

20. DEPOSITO BERJANGKA (lanjutan)

20. TIME DEPOSITS (continued)

- c. Rincian deposito berjangka berdasarkan mata uang dan sisa umur hingga jatuh tempo:

- c. Details of time deposits by currency and remaining period to maturity are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
<u>Rupiah</u>			<u>Rupiah</u>
≤ 1 bulan	85.190.601	66.439.113	≤ 1 month
> 1 bulan ≤ 3 bulan	29.134.976	37.434.888	> 1 month ≤ 3 months
> 3 bulan ≤ 6 bulan	9.635.943	20.558.238	> 3 months ≤ 6 months
> 6 bulan ≤ 12 bulan	9.921.401	9.195.878	> 6 months ≤ 12 months
> 12 bulan ≤ 24 bulan	47.227	11.543.318	> 12 months ≤ 24 months
	133.930.148	145.171.435	
<u>Dolar Amerika Serikat</u>			<u>United States Dollar</u>
≤ 1 bulan	4.997.452	186.307	≤ 1 month
> 1 bulan ≤ 3 bulan	906.749	811.341	> 1 month ≤ 3 months
> 3 bulan ≤ 6 bulan	448.970	8.037	> 3 months ≤ 6 months
> 6 bulan ≤ 12 bulan	394.575	2.840	> 6 months ≤ 12 months
	6.747.746	1.008.525	
<u>Dolar Singapura</u>			<u>Singapore Dollar</u>
≤ 1 bulan	3.596	1.216	≤ 1 month
> 1 bulan ≤ 3 bulan	12.149	11.055	> 1 month ≤ 3 months
> 3 bulan ≤ 6 bulan	-	5.796	> 3 months ≤ 6 months
	15.745	18.067	
Total	140.693.639	146.198.027	Total

Deposito berjangka yang dijadikan jaminan atas fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank kepada konsumennya pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp704.548 dan Rp1.040.402 (Catatan 11g).

As of December 31, 2023 and 2022, time deposits amounting to Rp704,548 and Rp1,040,402, respectively, are pledged as collateral for loans provided by the Bank to its customers (Note 11g).

Deposito berjangka dari pihak-pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp76.717.583 dan Rp79.389.842 (Catatan 43).

As of December 31, 2023 and 2022, time deposits from depositors who are related parties of the Bank amounted to Rp76,717,583 and Rp79,389,842, respectively (Note 43).

Dana Syirkah Temporer - Deposito Mudharabah

Temporary Syirkah Funds - Mudharabah Time Deposits

- a. Berdasarkan jangka waktu kontrak

- a. By contractual period

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
1 bulan	7.144.730	10.306.290	1 month
3 bulan	8.653.688	5.096.193	3 months
6 bulan	3.245.297	4.060.838	6 months
12 bulan	1.833.604	58.587	12 months
24 bulan	6.238	1.649	24 months
Total	20.883.557	19.523.557	Total

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

20. DEPOSITO BERJANGKA (lanjutan)

Dana Syirkah Temporer - Deposito Mudharabah (lanjutan)

b. Berdasarkan sisa umur jatuh tempo

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022
≤ 1 bulan	7.144.730	12.300.037
> 1 bulan ≤ 3 bulan	8.653.688	3.169.127
> 3 bulan ≤ 6 bulan	3.245.297	4.025.968
> 6 bulan ≤ 12 bulan	1.833.604	27.682
> 12 bulan ≤ 24 bulan	6.238	743
Total	20.883.557	19.523.557

c. Berdasarkan hubungan

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022
Pihak Ketiga	11.975.188	11.886.366
Pihak Berelasi (Catatan 43)	8.908.369	7.637.191
Total	20.883.557	19.523.557

Deposito *mudharabah* merupakan investasi pihak lain yang mendapatkan imbalan bagi hasil dari pendapatan atas penggunaan dana tersebut dengan *nisbah* yang ditetapkan dan disetujui sebelumnya.

Nisbah dan tingkat bagi hasil rata-rata untuk deposito *mudharabah* untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2023	
	Nisbah (%)/ Ratio (%)	Tingkat bagi hasil (%)/ Profit sharing rate (%)
1 bulan	29,50 : 70,50	2,95%
3 bulan	29,50 : 70,50	2,95%
6 bulan	29,50 : 70,50	2,95%
12 bulan	29,50 : 70,50	2,95%
24 bulan	29,50 : 70,50	2,95%

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 tidak terdapat deposito *mudharabah* yang dijadikan jaminan.

20. TIME DEPOSITS (continued)

Temporary Syirkah Funds - Mudharabah Time Deposits (continued)

b. By remaining period to maturity

	31 Desember/ December 31, 2022	
		≤ 1 month
> 1 month ≤ 3 months	3.169.127	
> 3 months ≤ 6 months	4.025.968	
> 6 months ≤ 12 months	27.682	
> 12 months ≤ 24 months	743	
Total	19.523.557	

c. By relationship

	31 Desember/ December 31, 2022	
		Third Parties Related Party (Note 43)
Pihak Ketiga	11.886.366	
Pihak Berelasi (Catatan 43)	7.637.191	
Total	19.523.557	

Mudharabah time deposits represent investment from other parties who receive share in the income derived from the use of such funds based on a predetermined and pre-agreed ratio.

The average rate of ratio and profit sharing for mudharabah time deposits for the year ended December 31, 2023 and 2022, are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2022	
	Nisbah (%)/ Ratio (%)	Tingkat bagi hasil (%)/ Profit sharing rate (%)
1 bulan	29,50 : 70,50	2,88%
3 months	29,50 : 70,50	2,88%
6 months	29,50 : 70,50	2,88%
12 months	29,50 : 70,50	2,88%
24 months	39 : 61	3,81%

As of December 31, 2023 and 2022, there are no mudharabah time deposits which are pledged as collateral.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

21. SIMPANAN DARI BANK LAIN

Tingkat suku bunga rata-rata per tahun untuk simpanan dari bank lain adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2023
Giro	1,12%
Deposito	4,69%
Inter-bank call money	5,65%

Rincian simpanan dari bank lain berdasarkan sisa umur sampai dengan saat jatuh tempo adalah sebagai berikut:

	31 Desember/December 31, 2023				
	≤ 1 bulan/ month	> 1 - 3 bulan/ months	> 3 - 6 bulan/ months	> 6 - 12 bulan/ months	Total
Rupiah Giro	91.312	-	-	-	91.312
Total	91.312	-	-	-	91.312

	31 Desember/December 31, 2022				
	≤ 1 bulan/ month	> 1 - 3 bulan/ months	> 3 - 6 bulan/ months	> 6 - 12 bulan/ months	Total
Rupiah Giro	136.408	-	-	-	136.408
Total	136.408	-	-	-	136.408

Simpanan dari bank lain yang termasuk pihak-pihak berelasi pada 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar RpNihil.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, tidak terdapat simpanan dari bank lain yang dijadikan jaminan.

Dana Syirkah Temporer - Simpanan Dari Bank Lain

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022
Pihak Ketiga Rupiah		
Tabungan Mudharabah	14.781	19.674
Giro Mudharabah	4.154	56
Deposito berjangka Mudharabah	4.300	19.089
Total	23.235	38.819

Simpanan bank lain berdasarkan dana syirkah temporer yang termasuk pihak-pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar RpNihil.

21. DEPOSITS FROM OTHER BANKS

Average annual interest rates for deposits from other banks are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2022	
	0,99%	Demand Deposit
	2,75%	Time Deposits
	3,40%	Inter-bank call money

Details of deposits from other banks by remaining period to maturity are as follows:

	31 Desember/December 31, 2023				
	≤ 1 bulan/ month	> 1 - 3 bulan/ months	> 3 - 6 bulan/ months	> 6 - 12 bulan/ months	Total
Rupiah Demand deposits	91.312	-	-	-	91.312
Total	91.312	-	-	-	91.312

	31 Desember/December 31, 2022				
	≤ 1 bulan/ month	> 1 - 3 bulan/ months	> 3 - 6 bulan/ months	> 6 - 12 bulan/ months	Total
Rupiah Demand deposits	136.408	-	-	-	136.408
Total	136.408	-	-	-	136.408

As of December 31, 2023 and 2022, deposits from other banks which are related parties of the Bank amounted to RpNil respectively.

As of December 31, 2023 and 2022, there are no deposits from other banks which are pledged as collateral.

Temporary Syirkah Funds - Deposits From Other Banks

This account consists of:

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	Third Parties Rupiah
Mudharabah Saving deposits	14.781	19.674	
Mudharabah Current accounts	4.154	56	
Mudharabah Time deposits	4.300	19.089	
Total	23.235	38.819	

Deposits from other banks based on temporary syirkah funds which are related parties of the Bank as of December 31, 2023 and 2022 amounted to RpNil, respectively.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

21. SIMPANAN DARI BANK LAIN (lanjutan)

Dana Syirkah Temporer - Simpanan Dari Bank Lain (lanjutan)

Tabungan dan giro *Mudharabah* merupakan simpanan dana pihak lain yang mendapatkan imbalan bagi hasil dari pendapatan Bank atas penggunaan dana tersebut dengan nisbah yang ditetapkan dan disetujui sebelumnya.

Deposito *Mudharabah* merupakan investasi pihak lain yang mendapatkan imbalan bagi hasil dari pendapatan atas penggunaan dana tersebut dengan nisbah yang ditetapkan dan disetujui sebelumnya.

Berdasarkan tingkat suku bunga dan bagi hasil per tahun:

	31 Desember/ December 31, 2023
Giro <i>mudharabah</i>	1,28%
Tabungan <i>mudharabah</i>	3,42%
Deposito berjangka <i>mudharabah</i>	2,95%

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, tidak terdapat simpanan dari bank lain *mudharabah* yang dijadikan jaminan.

21. DEPOSITS FROM OTHER BANKS (continued)

Temporary Syirkah Funds - Deposits From Other Banks (continued)

Mudharabah savings deposits and current account represent deposits from third parties who receive a share in the revenue earned by the Bank from the use of such funds based on a pre-determined and pre-agreed ratio.

Mudharabah time deposits represent investment from other parties who receive share in the income derived from the use of such funds based on a predetermined and pre-agreed ratio.

By annual interest rates and profit sharing:

	31 Desember/ December 31, 2022	
	1,37%	<i>Mudharabah</i> demand deposits
	1,03%	<i>Mudharabah</i> saving deposits
	2,88%	<i>Mudharabah</i> Time deposits

As of December 31, 2023 and 2022, there are no *mudharabah* deposits from other banks which are pledged as collateral.

22. LIABILITAS AKSEPTASI

Rincian liabilitas akseptasi kepada nasabah adalah sebagai berikut:

a. Berdasarkan Jenis dan Mata Uang

	31 Desember/ December 31, 2023
<u>Rupiah</u>	
Pihak ketiga	
Surat Kredit Berdokumen	
Dalam Negeri (SKBDN)	320.522
Letter of Credit	-
Pihak berelasi (Catatan 43)	
Surat Kredit Berdokumen	
Dalam Negeri (SKBDN)	224.045
Total	544.567

b. Berdasarkan Jangka Waktu:

	31 Desember/ December 31, 2023
≤ 1 bulan	362.394
> 1 bulan - 3 bulan	27.223
> 3 bulan - 1 tahun	154.950
Total	544.567

22. ACCEPTANCES PAYABLE

The details of acceptances payable from customers are as follows:

a. By Type and Currency

	31 Desember/ December 31, 2022	
<u>Rupiah</u>		
<u>Third Parties</u>		
Domestic Document		
Letter of Credit	294.876	
Letter of Credit	7.161	
Related parties (Note 43)		
Domestic Document		
Letter of Credit	118.525	
Total	420.562	Total

b. By Period

	31 Desember/ December 31, 2022	
≤ 1 month	80.697	
> 1 month - 3 months	49.568	
> 3 months - 1 year	290.297	
Total	420.562	Total

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

23. SURAT-SURAT DITERBITKAN	BERHARGA	YANG	23. SECURITIES ISSUED
	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
<u>Rupiah</u>			<u>Rupiah</u>
Long Term Note Yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum Bank Tabungan Negara Tahun 2021 Tahap I Pihak berelasi (Catatan 43)	8.872	9.529	Long Term Notes Through Private Placement Bank Tabungan Negara 2021 Phase I Related parties (Note 43)
Long Term Note II Yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum Bank Tabungan Negara Tahun 2022 Seri A Pihak berelasi (Catatan 43)	43.552	46.903	Long Term Notes II Through Private Placement Bank Tabungan Negara 2022 Series A Related parties (Note 43)
Long Term Note II Yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum Bank Tabungan Negara Tahun 2022 Seri B Pihak berelasi (Catatan 43)	72.652	78.033	Long Term Notes II Through Private Placement Bank Tabungan Negara 2022 Series B Related parties (Note 43)
Long Term Note III Yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum Bank Tabungan Negara Tahun 2022 Tahap I Pihak berelasi (Catatan 43)	196.324	210.866	Long Term Notes III Through Private Placement Bank Tabungan Negara 2022 Phase I Related parties (Note 43)
Long Term Note III Yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum Bank Tabungan Negara Tahun 2022 Tahap II Pihak berelasi (Catatan 43)	121.979	131.185	Long Term Notes III Through Private Placement Bank Tabungan Negara 2022 Phase II Related parties (Note 43)
Long Term Note IV Yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum Bank Tabungan Negara Tahun 2023 Tahap I Pihak berelasi (Catatan 43)	35.245	-	Long Term Notes IV Through Private Placement Bank Tabungan Negara 2023 Phase I Related parties (Note 43)
Long Term Note IV Yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum Bank Tabungan Negara Tahun 2023 Tahap II Pihak berelasi (Catatan 43)	397.517	-	Long Term Notes IV Through Private Placement Bank Tabungan Negara 2023 Phase II Related parties (Note 43)
Long Term Note IV Yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum Bank Tabungan Negara Tahun 2023 Tahap III Seri A Pihak berelasi (Catatan 43)	6.242	-	Long Term Notes IV Through Private Placement Bank Tabungan Negara 2023 Phase III Series A Related parties (Note 43)
Long Term Note IV Yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum Bank Tabungan Negara Tahun 2023 Tahap III Seri B Pihak berelasi (Catatan 43)	234.542	-	Long Term Notes IV Through Private Placement Bank Tabungan Negara 2023 Phase III Series B Related parties (Note 43)
Sukuk Mudharabah Bank Tabungan Negara Tahun 2023 Tahap I Pihak berelasi (Catatan 43)	90.807	-	Sukuk Mudharabah Bank Tabungan Negara 2023 Phase I Related parties (Note 43)
Sukuk Mudharabah Bank Tabungan Negara Tahun 2023 Tahap II Pihak berelasi (Catatan 43)	175.039	-	Sukuk Mudharabah Bank Tabungan Negara 2023 Phase II Related parties (Note 43)
Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I setelah dikurangi biaya emisi yang belum diamortisasi masing-masing sebesar Rp310 dan Rp1.366 pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022			Continuing Bonds IV Phase I net of unamortized issuance cost amounted to Rp310 and Rp1,366 as of December 31, 2023 and 2022, respectively
Pihak ketiga Pihak berelasi (Catatan 43)	80.872 114.818	508.247 413.387	Third parties Related parties (Note 43)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

23. SURAT-SURAT BERHARGA YANG
DITERBITKAN (lanjutan)

23. SECURITIES ISSUED (continued)

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
<u>Rupiah (lanjutan)</u>			<u>Rupiah (continued)</u>
Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II setelah dikurangi biaya emisi yang belum diamortisasi masing-masing sebesar Rp1.274 dan Rp1.909 pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022			Continuing Bonds IV Phase I net of unamortized issuance cost amounted to Rp1,274 and Rp1,909 as of December 31, 2023 and 2022, respectively
Pihak ketiga	627.200	748.568	Third parties
Pihak berelasi (Catatan 43)	371.526	249.523	Related parties (Note 43)
Obligasi Berkelanjutan III Tahap II setelah dikurangi biaya emisi yang belum diamortisasi masing-masing sebesar Rp127 dan Rp604 pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022			Continuing Bonds III Phase II net of unamortized issuance cost amounted to Rp127 and Rp604 as of December 31, 2023 and 2022, respectively
Pihak ketiga	279.470	454.275	Third parties
Pihak berelasi (Catatan 43)	939.903	764.621	Related parties (Note 43)
Obligasi Berkelanjutan III Tahap I setelah dikurangi biaya emisi yang belum diamortisasi masing-masing sebesar Rp743 dan Rp1.298 pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022			Continuing Bonds III Phase I net of unamortized issuance cost amounted to Rp742 and Rp1,298 as of December 31, 2023 and 2022, respectively
Pihak ketiga	274.409	791.541	Third parties
Pihak berelasi (Catatan 43)	1.963.848	1.446.161	Related parties (Note 43)
Obligasi Berkelanjutan II Tahap I setelah dikurangi biaya emisi yang belum diamortisasi masing-masing sebesar Rp170 dan Rp497 pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022			Continuing Bonds II Phase I net of unamortized issuance cost amounted to Rp170 and Rp497 as of December 31, 2023 and 2022, respectively
Pihak ketiga	29.994	182.886	Third parties
Pihak berelasi (Catatan 43)	769.837	616.616	Related parties (Note 43)
Obligasi Berkelanjutan I Tahap II setelah dikurangi biaya emisi yang belum diamortisasi masing-masing sebesar RpNihil dan Rp81 pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022			Continuing Bonds I Phase II net of unamortized issuance cost amounted to RpNil and Rp81 as of December 31, 2023 and 2022, respectively
Pihak ketiga	-	1.611.735	Third parties
Pihak berelasi (Catatan 43)	-	388.184	Related parties (Note 43)
Negotiable Certificate of Deposits (NCD) setelah dikurangi diskonto masing-masing sebesar Rp62.549 dan RpNihil pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022			Negotiable Certificate of Deposits (NCD) net of discounts amounted to Rp62.549 and RpNil as of December 31, 2023 and 2022, respectively
Pihak ketiga	1.111.628	-	Third parties
Pihak berelasi (Catatan 43)	325.822	-	Related parties (Note 43)
Total	8.272.098	8.652.260	Total

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**23. SURAT-SURAT BERHARGA YANG
DITERBITKAN (lanjutan)**

i. Long Term Note Yang Dilakukan Tanpa Melalui
Penawaran Umum Bank Tabungan Negara
Tahun 2021 Tahap I

Bank menerbitkan *Long Term Note (LTN)* Yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum Bank Tabungan Negara Tahun 2021 Tahap I dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp10.186. LTN tersebut diterbitkan senilai 100% dari nilai nominalnya dengan tingkat bunga tetap tahunan sebesar 1,37% yang dibayarkan tiap tiga bulanan berikut amortisasi pokok dan akan jatuh tempo pada tanggal 17 Juni 2037. PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) bertindak sebagai agen pembayaran. LTN ini tidak dilakukan pemeringkatan.

Penerimaan bersih dari penerbitan LTN tersebut digunakan untuk penyaluran pembiayaan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

ii. Long Term Note II Yang Dilakukan Tanpa
Melalui Penawaran Umum Bank Tabungan
Negara Tahun 2022 Seri A

Bank menerbitkan *Long Term Note (LTN)* Yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum Bank Tabungan Negara Tahun 2022 dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp47.740. LTN tersebut diterbitkan senilai 100% dari nilai nominalnya dengan tingkat bunga tetap tahunan sebesar 1,37% yang dibayarkan tiap tiga bulanan berikut amortisasi pokok dan akan jatuh tempo pada tanggal 12 Oktober 2036. PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) bertindak sebagai agen pembayaran. LTN ini tidak dilakukan pemeringkatan.

Penerimaan bersih dari penerbitan LTN tersebut digunakan untuk penyaluran pembiayaan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

23. SECURITIES ISSUED (continued)

i. Long Term Notes Through Private Placement
Bank Tabungan Negara 2021 Phase I

The Bank issued Long Term Notes (LTN) Bank Tabungan Negara Through Private Placement Year 2021 Phase I with a total nominal value of Rp10,186. Such LTN were issued at 100% of their nominal value with an annual fixed interest rate of 1.37%, payable every three months with amortized principal and will mature on June 17, 2037. The payment agent for LTN is PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). LTN were not rated.

The net proceeds from the issuance of the bonds were used to finance Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) loans.

ii. Long Term Notes II Through Private Placement
Bank Tabungan Negara 2022 Series A

The Bank issued Long Term Notes (LTN) Bank Tabungan Negara Through Private Placement Year 2022 with a total nominal value of Rp47,740. Such LTN were issued at 100% of their nominal value with an annual fixed interest rate of 1.37%, payable every three months with amortized principal and will mature on October 12, 2036. The payment agent for LTN is PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). LTN were not rated.

The net proceeds from the issuance of the bonds were used to finance Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) loans.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**23. SURAT-SURAT BERHARGA YANG
DITERBITKAN (lanjutan)**

iii. Long Term Note II Yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum Bank Tabungan Negara Tahun 2022 Seri B

Bank menerbitkan *Long Term Note (LTN)* Yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum Bank Tabungan Negara Tahun 2022 dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp79.379. *LTN* tersebut diterbitkan senilai 100% dari nilai nominalnya dengan tingkat bunga tetap tahunan sebesar 0,55% yang dibayarkan tiap tiga bulanan berikut amortisasi pokok dan akan jatuh tempo pada tanggal 12 April 2037. PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) bertindak sebagai agen pembayaran. *LTN* ini tidak dilakukan pemeringkatan.

Penerimaan bersih dari penerbitan *LTN* tersebut digunakan untuk penyaluran pembiayaan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

iv. Long Term Note III Yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum Bank Tabungan Negara Tahun 2022 Tahap I

Bank menerbitkan *Long Term Note (LTN)* Yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum Bank Tabungan Negara Tahun 2022 dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp210.866. *LTN* tersebut diterbitkan senilai 100% dari nilai nominalnya dengan tingkat bunga tetap tahunan sebesar 0,55% yang dibayarkan tiap tiga bulanan berikut amortisasi pokok dan akan jatuh tempo pada tanggal 14 Juni 2037. PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) bertindak sebagai agen pembayaran. *LTN* ini tidak dilakukan pemeringkatan.

Penerimaan bersih dari penerbitan *LTN* tersebut digunakan untuk penyaluran pembiayaan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

23. SECURITIES ISSUED (continued)

iii. Long Term Notes II Through Private Placement Bank Tabungan Negara 2022 Series B

The Bank issued *Long Term Notes (LTN)* Bank Tabungan Negara Through Private Placement Year 2022 with a total nominal value of Rp79,379. Such *LTN* were issued at 100% of their nominal value with an annual fixed interest rate of 0.55%, payable every three months with amortized principal and will mature on April 12, 2037. The payment agent for *LTN* is PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). *LTN* were not rated.

The net proceeds from the issuance of the bonds were used to finance Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) loans.

iv. Long Term Notes III Through Private Placement Bank Tabungan Negara 2022 Phase I

The Bank issued *Long Term Notes (LTN)* Bank Tabungan Negara Through Private Placement Year 2022 with a total nominal value of Rp210,866. Such *LTN* were issued at 100% of their nominal value with an annual fixed interest rate of 0.55%, payable every three months with amortized principal and will mature on June 14, 2037. The payment agent for *LTN* is PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). *LTN* were not rated.

The net proceeds from the issuance of the bonds were used to finance Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) loans.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**23. SURAT-SURAT BERHARGA YANG
DITERBITKAN (lanjutan)**

v. Long Term Note III Yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum Bank Tabungan Negara Tahun 2022 Tahap II

Bank menerbitkan *Long Term Note (LTN)* Yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum Bank Tabungan Negara Tahun 2022 dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp131.185. *LTN* tersebut diterbitkan senilai 100% dari nilai nominalnya dengan tingkat bunga tetap tahunan sebesar 0,55% yang dibayarkan tiap tiga bulanan berikut amortisasi pokok dan akan jatuh tempo pada tanggal 28 Maret 2037. PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) bertindak sebagai agen pembayaran. *LTN* ini tidak dilakukan pemeringkatan.

Penerimaan bersih dari penerbitan *LTN* tersebut digunakan untuk penyaluran pembiayaan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

vi. Long Term Note IV Yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum Bank Tabungan Negara Tahun 2023 Tahap I

Bank menerbitkan *Long Term Note (LTN)* Yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum Bank Tabungan Negara Tahun 2023 dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp35.898. *LTN* tersebut diterbitkan senilai 100% dari nilai nominalnya dengan tingkat bunga tetap tahunan sebesar 0,55% yang dibayarkan tiap tiga bulanan berikut amortisasi pokok dan akan jatuh tempo pada tanggal 28 April 2037. PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) bertindak sebagai agen pembayaran. *LTN* ini tidak dilakukan pemeringkatan.

Penerimaan bersih dari penerbitan *LTN* tersebut digunakan untuk penyaluran pembiayaan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

23. SECURITIES ISSUED (continued)

v. Long Term Notes III Through Private Placement Bank Tabungan Negara 2022 Phase II

The Bank issued Long Term Notes (LTN) Bank Tabungan Negara Through Private Placement Year 2022 with a total nominal value of Rp131,185. Such LTN were issued at 100% of their nominal value with an annual fixed interest rate of 0.55%, payable every three months with amortized principal and will mature on March 28, 2037. The payment agent for LTN is PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). LTN were not rated.

The net proceeds from the issuance of the bonds were used to finance Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) loans.

vi. Long Term Notes IV Through Private Placement Bank Tabungan Negara 2023 Phase I

The Bank issued Long Term Notes (LTN) Bank Tabungan Negara Through Private Placement Year 2023 with a total nominal value of Rp35,898. Such LTN were issued at 100% of their nominal value with an annual fixed interest rate of 0.55%, payable every three months with amortized principal and will mature on April 28, 2037. The payment agent for LTN is PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). LTN were not rated.

The net proceeds from the issuance of the bonds were used to finance Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) loans.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

23. SURAT-SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN (lanjutan)

23. SECURITIES ISSUED (continued)

vii. Long Term Note IV Yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum Bank Tabungan Negara Tahun 2023 Tahap II

vii. Long Term Notes IV Through Private Placement Bank Tabungan Negara 2023 Phase II

Bank menerbitkan *Long Term Note (LTN)* Yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum Bank Tabungan Negara Tahun 2023 dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp404.745. *LTN* tersebut diterbitkan senilai 100% dari nilai nominalnya dengan tingkat bunga tetap tahunan sebesar 1,37% yang dibayarkan tiap tiga bulanan berikut amortisasi pokok dan akan jatuh tempo pada tanggal 15 September 2037. PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) bertindak sebagai agen pembayaran. *LTN* ini tidak dilakukan pemeringkatan.

The Bank issued Long Term Notes (LTN) Bank Tabungan Negara Through Private Placement Year 2023 with a total nominal value of Rp404,745. Such LTN were issued at 100% of their nominal value with an annual fixed interest rate of 1.37%, payable every three months with amortized principal and will mature on September 15, 2037. The payment agent for LTN is PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). LTN were not rated.

Penerimaan bersih dari penerbitan *LTN* tersebut digunakan untuk penyaluran pembiayaan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

The net proceeds from the issuance of the bonds were used to finance Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) loans.

viii. Long Term Note IV Yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum Bank Tabungan Negara Tahun 2023 Tahap III Seri A

viii. Long Term Notes IV Through Private Placement Bank Tabungan Negara 2023 Phase III Series A

Bank menerbitkan *Long Term Note (LTN)* Yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum Bank Tabungan Negara Tahun 2023 dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp6.242. *LTN* tersebut diterbitkan senilai 100% dari nilai nominalnya dengan tingkat bunga tetap tahunan sebesar 0,55% yang dibayarkan tiap tiga bulanan berikut amortisasi pokok dan akan jatuh tempo pada tanggal 27 Desember 2038. PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) bertindak sebagai agen pembayaran. *LTN* ini tidak dilakukan pemeringkatan.

The Bank issued Long Term Notes (LTN) Bank Tabungan Negara Through Private Placement Year 2023 with a total nominal value of Rp6,242. Such LTN were issued at 100% of their nominal value with an annual fixed interest rate of 0.55%, payable every three months with amortized principal and will mature on December 27, 2038. The payment agent for LTN is PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). LTN were not rated.

Penerimaan bersih dari penerbitan *LTN* tersebut digunakan untuk penyaluran pembiayaan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

The net proceeds from the issuance of the bonds were used to finance Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) loans.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

23. SURAT-SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN (lanjutan)

- ix. Long Term Note IV Yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum Bank Tabungan Negara Tahun 2023 Tahap III Seri B

Bank menerbitkan *Long Term Note (LTN)* Yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum Bank Tabungan Negara Tahun 2023 dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp234.542. *LTN* tersebut diterbitkan senilai 100% dari nilai nominalnya dengan tingkat bunga tetap tahunan sebesar 1,37% yang dibayarkan tiap tiga bulanan berikut amortisasi pokok dan akan jatuh tempo pada tanggal 27 Desember 2037. PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) bertindak sebagai agen pembayaran. *LTN* ini tidak dilakukan pemeringkatan.

Penerimaan bersih dari penerbitan *LTN* tersebut digunakan untuk penyaluran pembiayaan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

- x. Sukuk Mudharabah Bank Tabungan Negara Tahun 2023 Tahap I

Bank menerbitkan Sukuk *Mudharabah* Jangka Panjang Yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum Bank Tabungan Negara Tahun 2023 tahap I dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp92.553. Sukuk tersebut diterbitkan senilai 100% dari nilai nominalnya dengan dengan nisbah bagi hasil sebesar 11,00% yang dihitung dari pendapatan bagi hasil dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen sebesar 0,55% per tahun yang dibayarkan tiap tahun berikut amortisasi dana sukuk dan akan jatuh tempo pada tanggal 28 Oktober 2036. PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) bertindak sebagai agen pembayaran. Sukuk ini tidak dilakukan pemeringkatan.

Penerimaan bersih dari penerbitan Sukuk tersebut digunakan untuk penyaluran pembiayaan Syariah Tabungan Perumahan Rakyat (Syariah Tapera).

23. SECURITIES ISSUED (continued)

- ix. Long Term Notes IV Through Private Placement Bank Tabungan Negara 2023 Phase III Series B

The Bank issued Long Term Notes (LTN) Bank Tabungan Negara Through Private Placement Year 2023 with a total nominal value of Rp234,542. Such LTN were issued at 100% of their nominal value with an annual fixed interest rate of 1.37%, payable every three months with amortized principal and will mature on December 27, 2037. The payment agent for LTN is PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). LTN were not rated.

The net proceeds from the issuance of the bonds were used to finance Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) loans.

- x. Sukuk Mudharabah Bank Tabungan Negara 2023 Phase I

The Bank issued Long Term Sukuk Mudharabah Bank Tabungan Negara Through Private Placement Year 2023 Phase I with a total nominal value of Rp92,553. Such Sukuk were issued at 100% of their nominal value with a profit-sharing ratio of 11.00% which is calculated from profit sharing income with indication of an equivalent of 0.55%, payable every year with amortized sukuk and will mature on October 28, 2036. The payment agent for Sukuk is PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Sukuk were not rated.

The net proceeds from the issuance of the bonds were used to Sharia finance Tabungan Perumahan Rakyat (Sharia Tapera) loans.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**23. SURAT-SURAT BERHARGA YANG
DITERBITKAN (lanjutan)**

**xi. Sukuk Mudharabah Bank Tabungan Negara
Tahun 2023 Tahap II**

Bank menerbitkan Sukuk Mudharabah Jangka Panjang Yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum Bank Tabungan Negara Tahun 2023 tahap II dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp175.039. Sukuk tersebut diterbitkan senilai 100% dari nilai nominalnya dengan dengan nisbah bagi hasil sebesar 27,40% yang dihitung dari pendapatan bagi hasil dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen sebesar 1,37% yang dibayarkan tiap tahun berikut amortisasi dana sukuk dan akan jatuh tempo pada tanggal 27 Desember 2036. PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) bertindak sebagai agen pembayaran. Sukuk ini tidak dilakukan pemeringkatan.

Penerimaan bersih dari penerbitan Sukuk tersebut digunakan untuk penyaluran pembiayaan Syariah Tabungan Perumahan Rakyat (Syariah Tapera).

xii. Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II

Bank menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV BTN Tahap II Tahun 2022 dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp1.000.000 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Obligasi tersebut diterbitkan senilai 100% dari nilai nominalnya dengan tingkat bunga tetap tahunan sebesar 5,50% dan 6,00% yang dibayarkan tiap tiga bulanan masing-masing untuk Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Seri A dan Seri B dan akan jatuh tempo masing-masing pada tanggal 24 Mei 2025 dan 24 Mei 2027. Penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II tahun 2022 tersebut telah dinyatakan efektif berdasarkan surat Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No.S-211/D.04/2020 tanggal 11 Agustus 2020.

Penerimaan bersih dari penerbitan obligasi tersebut digunakan sebagai sumber pembiayaan kredit. Hak pemegang obligasi adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Bank lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Bank yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Bank baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari. Obligasi ini tidak termasuk dalam program jaminan Pemerintah terhadap kewajiban pembayaran bank umum.

23. SECURITIES ISSUED (continued)

**xi. Sukuk Mudharabah Bank Tabungan Negara
2023 Phase II**

The Bank issued Long Term Sukuk Mudharabah Bank Tabungan Negara Through Private Placement Year 2023 Phase II with a total nominal value of Rp175,039. Such Sukuk were issued at 100% of their nominal value with a profit-sharing ratio of 27.40% which is calculated from profit sharing income with indication of an equivalent of 1.37%, payable every year with amortized sukuk and will mature on December 27, 2036. The payment agent for Sukuk is PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Sukuk were not rated.

The net proceeds from the issuance of the bonds were used to Sharia finance Tabungan Perumahan Rakyat (Sharia Tapera) loans.

xii. Continuing Bonds IV Phase II

The Bank issued Continuing Bonds IV Phase II of 2022 with a total nominal value of Rp1,000,000, which are registered in the Indonesia Stock Exchange (IDX). Such bonds were issued at 100% of their nominal value with an annual fixed interest rates of 5.50% and 6.00%, payable every three months for Continuing Bonds IV Phase II Series A dan Series B, respectively, and will mature on May 24, 2025 and May 24, 2027, respectively. The issuance of Continuing Bonds IV Phase II of 2022 became effective based on Letter No. S-211/D.04/2020 dated August 11, 2020 of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority.

The net proceeds from the issuance of the bonds were used to finance loans. The rights of the bondholders rank paripassu, without preferential rights, with those of the Bank's other creditors for existing or future creditor rights, except for the Bank's creditors' rights which are guaranteed specifically by the Bank's existing or future assets. The bonds are not included in the Government's guarantee program on the obligations of commercial banks.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

23. SURAT-SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN (lanjutan)

23. SECURITIES ISSUED (continued)

xii. Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II (lanjutan)

xii. Continuing Bonds IV Phase II (continued)

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Obligasi Berkelanjutan IV BTN Tahap II masing-masing mendapat penilaian peringkat idAA+ dan idAA dari PT Fitch Ratings Indonesia.

As of December 31, 2023 and 2022, Continuing Bonds IV Phase II were rated idAA+ and idAA by PT Fitch Ratings Indonesia.

Bertindak sebagai wali amanat Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II adalah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.

The trustee for Continuing Bonds IV Phase II is PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.

xiii. Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I

xiii. Continuing Bonds IV Phase I

Bank menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV BTN Tahap I Tahun 2020 dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp1.500.000 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Obligasi tersebut diterbitkan senilai 100% dari nilai nominalnya dengan tingkat bunga tetap tahunan sebesar 6,75%, 7,80% dan 8,40% yang dibayarkan tiap tiga bulanan masing-masing untuk Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I Seri A, Seri B dan Seri C dan akan jatuh tempo masing-masing pada tanggal 29 Agustus 2021, 19 Agustus 2023, dan 19 Agustus 2025. Penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I tahun 2020 tersebut telah dinyatakan efektif berdasarkan surat Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No.S-211/D.04/2020 tanggal 11 Agustus 2020.

The Bank issued Continuing Bonds IV Phase I of 2020 with a total nominal value of Rp1,500,000, which are registered in the Indonesia Stock Exchange (IDX). Such bonds were issued at 100% of their nominal value with an annual fixed interest rates of 6.75%, 7.80% and 8.40%, payable every three months for Continuing Bonds IV Phase I Series A, Series B and Series C, respectively, and will mature on August 29, 2021, August 19, 2023, and August 19, 2025, respectively. The issuance of Continuing Bonds IV Phase I of 2020 became effective based on Letter No. S-211/D.04/2020 dated August 11, 2020 of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority.

Penerimaan bersih dari penerbitan obligasi tersebut digunakan sebagai sumber pembiayaan kredit. Hak pemegang obligasi adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Bank lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Bank yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Bank baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari. Obligasi ini tidak termasuk dalam program jaminan Pemerintah terhadap kewajiban pembayaran bank umum.

The net proceeds from the issuance of the bonds were used to finance loans. The rights of the bondholders rank paripassu, without preferential rights, with those of the Bank's other creditors for existing or future creditor rights, except for the Bank's creditors' rights which are guaranteed specifically by the Bank's existing or future assets. The bonds are not included in the Government's guarantee program on the obligations of commercial banks.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Obligasi Berkelanjutan IV BTN Tahap I masing-masing mendapat penilaian peringkat idAA+ dan idAA dari PT Fitch Ratings Indonesia.

As of December 31, 2023 and 2022, Continuing Bonds IV Phase I were rated idAA+ and idAA by PT Fitch Ratings Indonesia, respectively.

Bertindak sebagai wali amanat Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I adalah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.

The trustee for Continuing Bonds IV Phase I is PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.

Sampai tanggal 31 Desember 2023, Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I Seri A dan B telah dilunasi oleh Bank pada tanggal jatuh tempo.

Until December 31, 2023, Continuing Bonds IV Phase I Series A and B has been fully paid by the Bank on the maturity date.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**23. SURAT-SURAT BERHARGA YANG
DITERBITKAN (lanjutan)**

23. SECURITIES ISSUED (continued)

xiv. Obligasi Berkelanjutan III Tahap II

xiv. Continuing Bonds III Phase II

Bank menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III BTN Tahap II Tahun 2019 dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp4.144.000 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Obligasi tersebut diterbitkan senilai 100% dari nilai nominalnya dengan tingkat bunga tetap tahunan sebesar 7,75%, 8,75% dan 9,00% yang dibayarkan tiap tiga bulanan masing-masing untuk Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Seri A, Seri B dan Seri C dan akan jatuh tempo masing-masing pada tanggal 8 Juli 2020, 28 Juni 2022, 28 Juni 2024. Penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Tahap II tahun 2019 tersebut telah dinyatakan efektif berdasarkan surat Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. S-352/D.04/ 2017 tanggal 22 Juni 2017.

The Bank issued Continuing Bonds III Phase II of 2019 with a total nominal value of Rp4,144,000, which are registered in the Indonesia Stock Exchange (IDX). Such bonds were issued at 100% of their nominal value with an annual fixed interest rates of 7.75%, 8.75% and 9.00%, payable every three months for Continuing Bonds III Phase II Series A, Series B and Series C, respectively, and will mature on July 8, 2020, June 28, 2022, and June 28, 2024, respectively. The issuance of Continuing Bonds III Phase II of 2019 became effective based on Letter No. S-352/D.04/2017 dated June 22, 2017 of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority.

Penerimaan bersih dari penerbitan obligasi tersebut digunakan sebagai sumber pembiayaan kredit. Hak pemegang obligasi adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Bank lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Bank yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Bank baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari. Obligasi ini tidak termasuk dalam program jaminan Pemerintah terhadap kewajiban pembayaran bank umum.

The net proceeds from the issuance of the bonds were used to finance loans. The rights of the bondholders rank paripassu, without preferential rights, with those of the Bank's other creditors for existing or future creditor rights, except for the Bank's creditors' rights which are guaranteed specifically by the Bank's existing or future assets. The bonds are not included in the Government's guarantee program on the obligations of commercial banks.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Obligasi Berkelanjutan III BTN Tahap II masing-masing mendapat penilaian peringkat idAA+ dan idAA dari PT Fitch Ratings Indonesia.

As of December 31, 2023 and 2022, Continuing Bonds III Phase II were rated idAA+ and idAA by PT Fitch Ratings Indonesia, respectively.

Bertindak sebagai wali amanat Obligasi Berkelanjutan III Tahap II adalah PT Bank Mega Tbk.

The trustee for Continuing Bonds III Phase II is PT Bank Mega Tbk.

Sampai tanggal 31 Desember 2023, Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Seri A dan Seri B telah dilunasi oleh Bank pada tanggal jatuh tempo.

Until December 31, 2023, Continuing Bonds III Phase II Series A and Series B has been fully paid by the Bank on the maturity date.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**23. SURAT-SURAT BERHARGA YANG
DITERBITKAN (lanjutan)**

23. SECURITIES ISSUED (continued)

xv. Obligasi Berkelanjutan III Tahap I

xv. Continuing Bonds III Phase I

Bank menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III BTN Tahap I Tahun 2017 dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp5.000.000 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Obligasi tersebut diterbitkan senilai 100% dari nilai nominalnya dengan tingkat bunga tetap tahunan sebesar 8,30%, 8,50%, 8,70% dan 8,90% yang dibayarkan tiap tiga bulanan masing-masing untuk Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Seri A, Seri B, Seri C dan Seri D dan akan jatuh tempo masing-masing pada tanggal 13 Juli 2020, 13 Juli 2022, 13 Juli 2024 dan 13 Juli 2027. Penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Tahap I tahun 2017 tersebut telah dinyatakan efektif berdasarkan surat Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. S-352/D.04/2017 tanggal 22 Juni 2017.

The Bank issued Continuing Bonds III Phase I of 2017 with a total nominal value of Rp5,000,000, which are registered in the Indonesia Stock Exchange (IDX). Such bonds were issued at 100% of their nominal value with an annual fixed interest rates of 8.30%, 8.50%, 8.70% and 8.90%, payable every three months for Continuing Bonds III Phase I Series A, Series B, Series C and Series D, respectively, and will mature on July 13, 2020, July 13, 2022, July 13, 2024 and July 13, 2027, respectively. The issuance of Continuing Bonds III Phase I of 2017 became effective based on Letter No. S-352/D.04/2017 dated June 22, 2017 of the Board of Commissioners the Financial Services Authority.

Penerimaan bersih dari penerbitan obligasi tersebut digunakan sebagai sumber pembiayaan kredit. Hak pemegang obligasi adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Bank lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Bank yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Bank baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari. Obligasi ini tidak termasuk dalam program jaminan Pemerintah terhadap kewajiban pembayaran bank umum.

The net proceeds from the issuance of the bonds were used to finance loans. The rights of the bondholders rank paripassu, without preferential rights, with those of the Bank's other creditors for existing or future creditor rights, except for the Bank's creditors' rights which are guaranteed specifically by the Bank's existing or future assets. The bonds are not included in the Government's guarantee program on the obligations of commercial banks.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Obligasi Berkelanjutan III BTN Tahap I masing-masing mendapat penilaian peringkat idAA+ dan idAA dari PT Fitch Ratings Indonesia.

As of December 31, 2023 and 2022, Continuing Bonds III Phase I were rated idAA+ and idAA by PT Fitch Ratings Indonesia, respectively.

Bertindak sebagai wali amanat Obligasi Berkelanjutan III Tahap I adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

The trustee for Continuing Bonds III Phase I is PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Sampai tanggal 31 Desember 2023, Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Seri A dan Seri B telah dilunasi oleh Bank pada tanggal jatuh tempo.

Until December 31, 2023, Continuing Bonds III Phase I Series A and Series B has been fully paid by the Bank on the maturity date.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**23. SURAT-SURAT BERHARGA YANG
DITERBITKAN (lanjutan)**

23. SECURITIES ISSUED (continued)

xvi. Obligasi Berkelanjutan II Tahap I

xvi. Continuing Bonds II Phase I

Bank menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2015 dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp3.000.000 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Obligasi tersebut diterbitkan senilai 100% dari nilai nominalnya dengan tingkat bunga tetap tahunan sebesar 9,63%, 9,88%, 10,00% dan 10,50% yang dibayarkan tiap tiga bulanan masing-masing untuk Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Seri A, Seri B, Seri C dan Seri D dan akan jatuh tempo masing-masing pada tanggal 8 Juli 2018, 8 Juli 2020, 8 Juli 2022 dan 8 Juli 2025. Penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I tahun 2015 tersebut telah dinyatakan efektif berdasarkan surat Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. S-207/D.04/2015 tanggal 30 Juni 2015.

The Bank issued Continuing Bonds II Phase I of 2015 with a total nominal value of Rp3,000,000, which are registered in the Indonesia Stock Exchange (IDX). Such bonds were issued at 100% of their nominal value with an annual fixed interest rates of 9.63%, 9.88%, 10.00% and 10.50%, payable every three months for Continuing Bonds II Phase I Series A, Series B, Series C and Series D, respectively, and will mature on July 8, 2018, July 8, 2020, July 8, 2022 and July 8, 2025, respectively. The issuance of Continuing Bonds II Phase I of 2015 became effective based on Letter No. S-207/D.04/2015 dated June 30, 2015 of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority.

Penerimaan bersih dari penerbitan obligasi tersebut digunakan sebagai sumber pembiayaan kredit. Hak pemegang obligasi adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Bank lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Bank yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Bank baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari. Obligasi ini tidak termasuk dalam program jaminan Pemerintah terhadap kewajiban pembayaran bank umum.

The net proceeds from the issuance of the bonds were used to finance loans. The rights of the bondholders rank paripassu, without preferential rights, with those of the Bank's other creditors for existing or future creditor rights, except for the Bank's creditors' rights which are guaranteed specifically by the Bank's existing or future assets. The bonds are not included in the Government's guarantee program on the obligations of commercial banks.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Obligasi Berkelanjutan II Tahap I masing-masing mendapat penilaian peringkat idAA+ dan idAA dari PT Fitch Ratings Indonesia.

As of December 31, 2023 and 2022, Continuing Bonds II Phase I were rated idAA+ and idAA by PT Fitch Ratings Indonesia, respectively.

Bertindak sebagai wali amanat Obligasi Berkelanjutan II Tahap I adalah PT Bank Mega Tbk.

The trustee for Continuing Bonds II Phase I is PT Bank Mega Tbk.

Sampai tanggal 31 Desember 2023, Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Seri A, Seri B dan Seri C telah dilunasi oleh Bank pada tanggal jatuh tempo.

Until December 31, 2023, Continuing Bonds II Phase I Series A, Series B and Series C has been fully paid by the Bank on the maturity date

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**23. SURAT-SURAT BERHARGA YANG
DITERBITKAN (lanjutan)**

23. SECURITIES ISSUED (continued)

xvii. Obligasi Berkelanjutan I Tahap II

xvii. Continuing Bonds I Phase II

Bank menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2013 dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp2.000.000 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Obligasi tersebut diterbitkan senilai 100% dari nilai nominalnya dengan tingkat bunga tetap tahunan sebesar 7,90% yang dibayarkan tiap tiga bulanan dan akan jatuh tempo pada tanggal 27 Maret 2023. Penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Tahap II tahun 2013 tersebut telah dinyatakan efektif berdasarkan surat Ketua BAPEPAM-LK No. S-6349/BL/2012 tanggal 28 Mei 2012.

The Bank issued Continuing Bonds I Phase II 2013 with a total nominal value of Rp2,000,000, which are registered in the Indonesia Stock Exchange (IDX). Such bonds were issued at 100% of their nominal value with an annual fixed interest rate of 7.90%, payable every three months and are due on March 27, 2023. The issuance of Continuing Bonds I Phase II of 2013 became effective based on Letter No. S-6349/BL/2012 dated May 28, 2012 of the Chairman of BAPEPAM-LK.

Penerimaan bersih dari penerbitan obligasi tersebut digunakan sebagai sumber pembiayaan kredit. Hak pemegang obligasi adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Bank lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Bank yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Bank baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Bank, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi pemegang obligasi.

The net proceeds from the issuance of the bonds were used to finance loans. The rights of the bondholders rank paripassu, without preferential rights, with those of the Bank's other creditors for existing or future creditor rights, except for the Bank's creditors' rights which are guaranteed specifically by the Bank's existing or future assets. The bonds are not secured by specific collateral, but are secured by all assets of the Bank, both movable and immovable, and those that are existing and will exist in the future, which are attributable to the Bank's bondholders.

Pada tanggal 31 Desember 2022, Obligasi Berkelanjutan I BTN Tahap II mendapat penilaian peringkat idAA dari PT Fitch Ratings Indonesia.

As of December 31, 2022, Continuing Bonds I Phase II were rated idAA by PT Fitch Ratings Indonesia.

Pada tanggal 12 Oktober 2020, Bank melakukan pembelian kembali Obligasi I Tahap II dengan nilai nominal sebesar Rp75.000 dengan harga beli Rp76.620. Pada tanggal 27 Mei 2022, Bank melakukan penjualan kembali Obligasi I Tahap II dengan nilai nominal sebesar Rp75.000 dengan harga jual Rp77.250.

As of October 12, 2020, the Bank bought back BTN Continuing Bonds I Phase II Bonds for nominal value of Rp75,000 with repurchased price of Rp76,620. As of May 27, 2022, the Bank resell BTN Continuing Bonds I Phase II Bonds for nominal value of Rp75,000 with reselling price of Rp77,250.

Bertindak sebagai wali amanat Obligasi Berkelanjutan I BTN Tahap II adalah PT Bank Mega Tbk.

The trustee for Continuing Bonds I Phase II is PT Bank Mega Tbk.

Sampai tanggal 31 Desember 2023, Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2023 telah dilunasi oleh Bank pada tanggal jatuh tempo.

Until December 31, 2023, Continuing Bonds I Phase II 2023 has been fully paid by the Bank on the maturity date.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

23. SURAT-SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN (lanjutan)

23. SECURITIES ISSUED (continued)

xviii. Negotiable Certificate of Deposits

xviii. Negotiable Certificate of Deposits

Pada tanggal 20 Oktober 2023, Bank menerbitkan *Negotiable Certificate of Deposits (NCD)* Tahap I dengan nilai pokok sebesar Rp1.500.000 dalam 3 (tiga) seri sebagai berikut:

On October 20, 2023, Bank issued *Negotiable Certificate of Deposits (NCD)* Phase I with principal value amounted to Rp1,500,000 within 3 (three) series as follows:

- Seri A: Nilai pokok *NCD* sebesar Rp500.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,40% per tahun, untuk jangka waktu 181 (seratus delapan puluh satu) hari dan akan jatuh tempo pada tanggal 17 April 2024. *NCD* tersebut diterbitkan sebesar 96,90%.
- Seri B: Nilai pokok *NCD* sebesar Rp70.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,45% per tahun, untuk jangka waktu 270 (dua ratus tujuh puluh) hari dan akan jatuh tempo pada tanggal 16 Juli 2024. *NCD* tersebut diterbitkan sebesar 95,39%.
- Seri C: Nilai pokok *NCD* sebesar Rp930.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,53% per tahun, untuk jangka waktu 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari dan akan jatuh tempo pada tanggal 21 Oktober 2024. *NCD* tersebut diterbitkan sebesar 93,76%.

- A Series: *NCD* principal value amounted to Rp500,000 with a fixed interest rate of 6.40% per annum, for 181 (one hundred and eighty one) days period and will mature on April 17, 2024. The *NCD* were issued at 96.90%.
- B Series: *NCD* principal value amounted to Rp70,000 with a fixed interest rate of 6.45% per annum, for 270 (two hundred seventy) days period and will mature on July 16, 2024. The *NCD* were issued at 95.39%.
- C Series: *NCD* principal value amounted to Rp930,000 with a fixed interest rate of 6.53% per annum, for 365 (three hundred sixty five) days period and will mature on October 21, 2024. The *NCD* were issued at 93.76%.

24. PINJAMAN YANG DITERIMA

24. FUND BORROWINGS

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022
<u>Pihak Ketiga</u>		
<u>Rupiah</u>		
PT Bank Central Asia Tbk	8.418.879	4.418.075
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	2.000.000	2.000.000
Citibank N.A., Jakarta	139.861	139.483
	10.558.740	6.557.558
<u>Mata Uang Asing</u>		
Japan International Cooperation Agency	750.059	807.762
	11.308.799	7.365.320
<u>Pihak Berelasi (Catatan 43)</u>		
<u>Rupiah</u>		
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	22.453.290	17.455.685
	22.453.290	17.455.685
Total	33.762.089	24.821.005

<u>Third Parties</u>
<u>Rupiah</u>
PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Danamon Indonesia Tbk
Citibank N.A., Jakarta
<u>Foreign Currency</u>
Japan International Cooperation Agency
<u>Related Parties (Note 43)</u>
<u>Rupiah</u>
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)

Total

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

24. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

a. Pinjaman dari PT Bank Central Asia Tbk (lanjutan)

Akun ini merupakan fasilitas pinjaman yang diperoleh dari PT Bank Central Asia Tbk ditujukan untuk pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) kepada debitur Bank.

Perjanjian pinjaman dengan PT Bank Central Asia Tbk telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir didokumentasikan dalam Perjanjian Kredit No. 11 tanggal 6 Desember 2023 yang terdiri dari:

- *Term Loan II* dan *III* yang dilakukan perpanjangan selama 36 bulan atas pinjaman tersebut sebesar masing-masing Rp1 triliun (angka penuh) yang memiliki bunga tetap sebesar masing-masing 5,50% dan akan jatuh tempo masing-masing pada tanggal 21 Juni 2024 dan 14 Juni 2024.
- *Term Loan IV* sebesar Rp2 triliun (angka penuh) yang memiliki bunga tetap sebesar 5,50% dengan jangka waktu selama 36 bulan yang akan jatuh tempo masing-masing sebesar Rp1 triliun (angka penuh) pada 25 April 2024 dan sebesar Rp1 triliun (angka penuh) pada 8 Mei 2024.
- *Term Loan V* sebesar Rp4 triliun (angka penuh) yang memiliki bunga tetap sebesar 6,75% dengan jangka waktu selama 12 bulan yang akan jatuh tempo pada 6 Desember 2024.

Pada tanggal 18 Mei 2022, Bank mendapatkan pinjaman dari PT Bank Central Asia Tbk Jakarta sebesar Rp420 miliar (angka penuh) yang memiliki bunga tetap sebesar 5,23% dan jatuh tempo pada 18 Mei 2025.

Persyaratan-persyaratan penting dalam perjanjian pinjaman Bank antara lain:

- Rasio *Non Performing Loan (NPL)* Bruto tidak melebihi 6%
- Menjaga Rasio *Non Performing Loan (NPL)* Neto sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- *Capital Adequacy Ratio (CAR)* minimal 12%
- Laba bersih tahun berjalan dengan angka positif
- Nilai *Liquidity Coverage Ratio* minimal sebesar 100%
- Rasio cakupan *Non Performing Loan (NPL)* tidak kurang dari 100%
- Rasio eksposur kredit tidak melebihi 40%

24. FUND BORROWINGS (continued)

a. Loan from PT Bank Central Asia Tbk (continued)

This account represents loan facility obtained from PT Bank Central Asia Tbk which is intended to Finance Housing Loans (KPR) of the Bank's debtors.

The loan agreement with PT Bank Central Asia Tbk has been amended several times. The last amendment was documented under the loan agreement No. 11 dated December 6, 2023 consist of:

- The *Term Loan II*, and *III* the loan were extended for 36 months, for each Rp1 trillion (full amount) with fixed interest rate are 5.50% per annum and will mature on June 21, 2024 and June 14, 2024, respectively.
- The *Term Loan IV* amounting Rp2 trillion (full amount) with fixed interest rate 5.50% with 36 months period which will mature amounting Rp1 trillion (full amount) on April 25, 2024 and amounting Rp1 trillion (full amount) on May 8, 2024, respectively.
- The *Term Loan V* amounting Rp4 trillion (full amount) with fixed interest rate 6.75% with 12 months period which will mature on December 6, 2024.

On May 18, 2022, the Bank received loan from PT Bank Central Asia Tbk with plafond amounting to Rp420 billion (full amount) with fixed interest rate of 5.23% and will mature on May 18, 2025.

The significant requirements in the Bank's loan agreement include the following:

- Gross *Non Performing Loan (NPL)* ratio shall not exceed 6%
- Maintain Net *Non Performing Loan (NPL)* ratio to comply in accordance with regulations
- *Capital Adequacy Ratio (CAR)* is minimum at least 12%
- Net income for the current year with positive numbers
- *Liquidity Coverage Ratio* minimum 100%
- *Non Performing Loan (NPL)* coverage minimum 100%
- Open credit exposure ratio shall not exceed than 40%

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

24. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

b. Pinjaman dari Citibank N.A., Jakarta

Akun ini merupakan fasilitas pinjaman yang diperoleh dari Citibank N.A., Jakarta ditujukan untuk mendukung Bank dalam menyalurkan kredit kepemilikan rumah di Indonesia.

Pada tanggal 18 Mei 2022, Bank mendapatkan pinjaman sindikasi sebesar Rp140 miliar (angka penuh) yang memiliki bunga tetap sebesar 4,70% dan jatuh tempo pada 18 Mei 2024.

Persyaratan-persyaratan penting dalam perjanjian pinjaman Bank antara lain:

- Rasio *Non Performing Loan (NPL)* Bruto tidak melebihi 6%
- Menjaga Rasio *Non Performing Loan (NPL)* Neto sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- *Capital Adequacy Ratio (CAR)* minimal 12%
- Laba bersih tahun berjalan dengan angka positif
- Nilai *Liquidity Coverage Ratio* minimal sebesar 100%
- Rasio cakupan *Non Performing Loan (NPL)* tidak kurang dari 100%
- Rasio eksposur kredit tidak melebihi 40%

c. Pinjaman dari Japan International Cooperation Agency

Akun ini merupakan fasilitas pinjaman yang diperoleh dari Japan International Cooperation Agency ditujukan untuk mendukung penyaluran kredit kepemilikan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah di Indonesia.

Pada tanggal 18 Mei 2022, Bank mendapatkan pinjaman dengan plafon sebesar JPY 7 miliar (angka penuh) atau ekuivalen Rp765.590 dengan bunga tetap sebesar 0,90% dan jatuh tempo pada tanggal 10 Mei 2027.

Persyaratan-persyaratan penting dalam perjanjian pinjaman Bank antara lain:

- Rasio *Non Performing Loan (NPL)* Bruto tidak melebihi 6%
- *Capital Adequacy Ratio (CAR)* minimal 12%
- Laba bersih tahun berjalan dengan angka positif
- Nilai *Liquidity Coverage Ratio* minimal sebesar 100%
- Rasio cakupan *Non Performing Loan (NPL)* tidak kurang dari 100%
- Rasio eksposur kredit tidak melebihi 46%

24. FUND BORROWINGS (continued)

b. Loan from Citibank N.A., Jakarta

This account represents loan facility obtained from Citibank N.A., Jakarta which is intended to support Banks in the context of selling housing loans in Indonesia.

On May 18, 2022, the Bank received syndicated loan with plafond amounting to Rp140 billion (full amount) with fixed interest rate of 4.70% and will mature on May 18, 2024, respectively.

The significant requirements in the Bank's loan agreement include the following:

- Gross Non Performing Loan (NPL) ratio shall not exceed 6%
- Maintain Net Non Performing Loan (NPL) ratio to comply in accordance with regulations
- Capital Adequacy Ratio (CAR) is minimum at least 12%
- Net income for the current year with positive numbers
- Liquidity Coverage Ratio minimum 100%
- Non Performing Loan (NPL) coverage minimum 100%
- Open credit exposure ratio shall not exceed than 40%

c. Loan from Japan International Cooperation Agency

This account represents loan facility obtained from Japan International Cooperation Agency which is intended to support distributing housing loans for low and middle income communities in Indonesia.

On May 18, 2022, the Bank received loan with plafond amounting to JPY 7 billion (full amount) or the equivalent to Rp765,590 with fixed interest rate of 0.90% and will mature on May 10, 2027, respectively.

The significant requirements in the Bank's loan agreement include the following:

- Gross Non Performing Loan (NPL) ratio shall not exceed 6%
- Capital Adequacy Ratio (CAR) is minimum at least 12%
- Net income for the current year with positive numbers
- Liquidity Coverage Ratio minimum 100%
- Non Performing Loan (NPL) coverage minimum 100%
- Open credit exposure ratio shall not exceed than 46%

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

24. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

d. Pinjaman dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk

Akun ini merupakan fasilitas pinjaman yang diperoleh dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk ditujukan untuk mendukung pengembangan bisnis dan operasional Bank.

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 108/PP/EB/0121 tanggal 17 Februari 2021, Bank mendapatkan pinjaman bilateral dengan plafon sebesar masing-masing Rp500 miliar (angka penuh), Rp500 miliar (angka penuh) dan Rp1.000 miliar (angka penuh) dengan bunga tetap sebesar masing-masing 5,75% dan jatuh tempo masing-masing pada tanggal 22 Agustus 2023, 25 September 2023 dan 24 Desember 2023.

Persyaratan-persyaratan penting dalam perjanjian pinjaman Bank antara lain:

- Mempertahankan minimum Capital Adequacy Ratio CAR sesuai dengan ketentuan regulator yang berlaku
- Rasio Non-Performing Loan (NPL) sesuai dengan ketentuan regulator yang berlaku
- Nilai Liquidity Coverage Ratio sesuai dengan ketentuan regulator yang berlaku

Bank telah melakukan pelunasan atas pinjaman tersebut saat jatuh tempo pada tanggal 22 Agustus 2023 dan 25 September 2023 masing-masing sebesar Rp500 miliar (angka penuh).

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 331/PP/EB/1023 tanggal 6 Oktober 2023, Bank mendapatkan perpanjangan jangka waktu fasilitas kredit serta memberikan tambahan limit fasilitas pinjaman dengan plafond sebesar masing-masing Rp1 triliun dengan bunga tetap sebesar 6,85% dan jatuh tempo masing-masing pada tanggal 27 Oktober 2024 dan 24 Juni 2024.

24. FUND BORROWINGS (continued)

d. Loan from PT Bank Danamon Indonesia Tbk

This account represents loan facility obtained from PT Bank Danamon Indonesia Tbk which is intended to support the business and operational development of the Bank.

The loan agreement with PT Bank Danamon Indonesia Tbk has been amended several times. The last amendment was documented under the loan agreement No. 108/PP/EB/0121 dated February 17, 2021, the Bank received a loan with plafond amounting for each Rp500 billion (full amount), Rp500 billion (full amount) and Rp1,000 billion (full amount) with fixed interest rate for each 5.75% and will mature on August 22, 2023, September 25, 2023 and December 24, 2023, respectively.

The significant requirements in the Bank's loan agreement include the following:

- Capital Adequacy Ratio (CAR) minimum is in accordance with the provisions of the applicable regulator under
- Non-Performing Loan (NPL) ratio in accordance with the provisions of the applicable regulator.
- Liquidity Coverage Ratio minimum is in accordance with the provisions of the applicable regulator

The Bank has fully repaid the loan at maturity date on August 22, 2023 and September 25, 2023 with each amounting to Rp500 million (full amount).

Based on loan agreement No. 331PP/EB/1023 dated October 6, 2023, the Bank get involve extending the payment arrangements and get an additional credit facility limit with plafond amounting for each Rp1 trillion with fixed interest rate of 6.85% and mature for each on October 27, 2024 and June 24, 2024.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

24. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

e. Pinjaman dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (SMF)

Bank memiliki beberapa perjanjian pinjaman dengan SMF sebagai berikut:

- Pinjaman SMF Tahap 1 Tahun 2019

Berdasarkan perjanjian No. 028/PP/SMF-BTN/II/2019 tanggal 12 Februari 2019, Bank mendapatkan pinjaman dengan plafond sebesar Rp1,8 triliun (angka penuh) dengan bunga tetap 9,20% dan akan jatuh tempo pada tanggal 12 Februari 2022.

Bank telah melakukan pelunasan atas pinjaman tersebut saat jatuh tempo pada tanggal 12 Februari 2022 sebesar Rp1,8 triliun (angka penuh).

- Pinjaman SMF Tahap 2 Tahun 2019

Berdasarkan perjanjian No. 055/PP/SMF-BTN/IV/2019 tanggal 11 April 2019, Bank mendapatkan pinjaman dengan plafond sebesar Rp1,5 triliun (angka penuh) yang terdiri atas sebesar Rp1 triliun (angka penuh) dan Rp500 miliar (angka penuh) dengan bunga tetap 8,60% yang akan jatuh tempo masing-masing pada tanggal 11 April 2022 dan 2 Mei 2022.

Bank telah melakukan pelunasan atas pinjaman tersebut saat jatuh tempo masing-masing pada tanggal 11 April 2022 dan 2 Mei 2022 sebesar Rp1 triliun (angka penuh) dan Rp500 miliar (angka penuh).

- Pinjaman SMF Tahap 3 Tahun 2019

Berdasarkan perjanjian No. 088/PP/SMF-BTN/V/2019 tanggal 29 Mei 2019, Bank mendapatkan pinjaman dengan plafond sebesar Rp1 triliun (angka penuh) dengan bunga tetap 8,79% yang akan jatuh tempo pada tanggal 31 Mei 2022.

Bank telah melakukan pelunasan atas pinjaman tersebut saat jatuh tempo pada tanggal 31 Mei 2022 sebesar Rp1 triliun (angka penuh).

24. FUND BORROWINGS (continued)

e. Loan from PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (SMF)

The Bank has several loan agreements with SMF as follow:

- SMF Loan Phase 1 Year 2019

Based on loan agreement No. 028/PP/SMF-BTN/II/2019 dated February 12, 2019, the Bank received a loan with plafond amounting to Rp1.8 trillion (full amount) with fixed interest rate of 9.20% and will mature on February 12, 2022.

The Bank has fully repaid the loan at maturity date on February 12, 2022 amounting to Rp1.8 trillion (full amount).

- SMF Loan Phase 2 Year 2019

Based on loan agreement No. 055/PP/SMF-BTN/IV/2019 dated April 11, 2019, the Bank received a loan with plafond amounting to Rp1.5 trillion (full amount) with details of amounting to Rp1 trillion (full amount) and Rp500 billion (full amount) with interest rate of 8.60% and will mature on April 11, 2022 and May 2, 2022.

The Bank has fully repaid the loan at maturity date for each on April 11, 2022 and May 2, 2022 and amounting to Rp1 trillion (full amount) and Rp500 billion (full amount).

- SMF Loan Phase 3 Year 2019

Based on loan agreement No. 088/PP/SMF-BTN/V/2019 dated May 29, 2019, the Bank received a loan with plafond amounting to Rp1 trillion (full amount) with fixed interest rate of 8.79% and will mature on May 31, 2022.

The Bank has fully repaid the loan at maturity date on May 31, 2022 amounting to Rp1 trillion (full amount).

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

24. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

e. Pinjaman dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (SMF) (lanjutan)

Bank memiliki beberapa perjanjian pinjaman dengan SMF sebagai berikut: (lanjutan)

- Pinjaman SMF Tahap 4 Tahun 2019

Berdasarkan perjanjian No. 092/PP/SMF-BTN/VII/2019 tanggal 9 Juli 2019, Bank mendapatkan pinjaman dengan plafond sebesar Rp2.095 miliar (angka penuh) yang terdiri atas sebesar Rp640 miliar (angka penuh) dengan bunga tetap 8,87% yang akan jatuh tempo pada tanggal 9 Juli 2022 dan sebesar Rp1.455 miliar (angka penuh) dengan bunga tetap 9,09% yang akan jatuh tempo pada tanggal 9 Juli 2024.

Bank telah melakukan pelunasan atas pinjaman tersebut saat jatuh tempo pada tanggal 9 Juli 2022 sebesar Rp640 miliar (angka penuh).

Berdasarkan perjanjian No. 003/FLPP/SMF/PP/SMF-BTN/II/2023 tanggal 6 Januari 2023, Bank mendapatkan pinjaman dalam rangka penyaluran kredit pemilikan rumah sejahtera untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Pencairan atas fasilitas ini dilakukan selama *availability period* sampai dengan tanggal 29 Desember 2023. Saldo pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp4.784.576 dengan suku bunga paling rendah sebesar 4,45% dengan jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun. Pengembalian dana pinjaman (angsuran pokok dan bunga) kepada SMF dilaksanakan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya, apabila tanggal jatuh tempo pembayaran pokok dan bunga jatuh pada hari libur nasional, maka pembayaran dilakukan pada hari kerja sesudah tanggal jatuh tempo pembayaran.

- Pinjaman SMF FLPP 2023

Berdasarkan perjanjian No. 003/FLPP/SMF/PP/SMF-BTN/II/2023 tanggal 6 Januari 2023, Bank mendapatkan pinjaman dalam rangka penyaluran kredit pemilikan rumah sejahtera untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

24. FUND BORROWINGS (continued)

e. Loan from PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (SMF) (continued)

The Bank has several loan agreements with SMF as follow: (continued)

- SMF Loan Phase 4 Year 2019

Based on loan agreement No. 092/PP/SMF-BTN/VII/2019 dated July 9, 2019, the Bank received a loan with plafond amounting to Rp2,095 billion (full amount) with details of amounting to Rp640 (full amount) billion with interest rate of 8.87% and will mature on July 9, 2022, and amounting to Rp1,455 billion (full amount) with interest rate of 9.09% and will mature on July 9, 2024.

The Bank has fully paid the loan at maturity date on July 9, 2022 amounting to Rp640 billion (full amount).

Based on loan agreement No. 003/FLPP/SMF/PP/SMF-BTN/II/2023 dated January 6, 2023, the Bank received a loan which is intended for distributing housing loans for low-income communities.

This disbursement of facility is carried out during the *availability period* until December 29, 2023. The outstanding balance as of December 31, 2023 is amounting to Rp4,784,576 with the lowest interest rate of 4.45% for a maximum period of 20 (twenty) years. Loan repayments (principal and interest installments) to SMF is no later than the 10th of each month, if the due date of principal and interest payments falls on a national holiday, the payment is made on the working day after the payment due date.

- SMF FLPP Year 2023

Based on loan agreement No. 003/FLPP/SMF/PP/SMF-BTN/II/2023 dated January 6, 2023, the Bank received a loan which is intended for distributing housing loans for low-income communities.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

24. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

e. Pinjaman dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (SMF) (lanjutan)

Bank memiliki beberapa perjanjian pinjaman dengan SMF sebagai berikut: (lanjutan)

- Pinjaman SMF FLPP 2023 (lanjutan)

Pencairan atas fasilitas ini dilakukan selama *availability period* sampai dengan tanggal 29 Desember 2023. Saldo pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp4.784.576 dengan suku bunga paling rendah sebesar 4,45% dengan jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun. Pengembalian dana pinjaman (angsuran pokok dan bunga) kepada SMF dilaksanakan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya, apabila tanggal jatuh tempo pembayaran pokok dan bunga jatuh pada hari libur nasional, maka pembayaran dilakukan pada hari kerja sesudah tanggal jatuh tempo pembayaran.

- Pinjaman SMF Mudharabah Muqayadah FLPP 2023

Berdasarkan perjanjian No. 006/FLPP/PP/SMF-BTNS/II/2023 dan No. 03/PKS/DIR/2023 tanggal 17 Januari 2023, Bank mendapatkan pinjaman dalam rangka penyaluran kredit pemilikan rumah sejahtera untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Pencairan atas fasilitas ini dilakukan selama *availability period* sampai dengan tanggal 29 Desember 2023. Saldo pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.316.435 dengan nisbah bagi hasil sebesar 22,25% yang dihitung dari pendapatan bagi hasil yang ditawarkan atas fasilitas pembiayaan yang ditarik selama *availability period* atau dengan ekuivalen sebesar setara dengan 4,45% per dengan jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun. Pengembalian dana pinjaman (angsuran pokok dan bunga) kepada SMF dilaksanakan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya, apabila tanggal jatuh tempo pembayaran pokok dan bunga jatuh pada hari libur nasional, maka pembayaran dilakukan pada hari kerja sesudah tanggal jatuh tempo pembayaran.

24. FUND BORROWINGS (continued)

e. Loan from PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (SMF) (continued)

The Bank has several loan agreements with SMF as follow: (continued)

- SMF FLPP Year 2023 (continued)

This disbursement of facility is carried out during the *availability period* until December 29, 2023. The outstanding balance as of December 31, 2023 is amounting to Rp4,784,576 with the lowest interest rate of 4.45% for a maximum period of 20 (twenty) years. Loan repayments (principal and interest installments) to SMF is no later than the 10th of each month, if the due date of principal and interest payments falls on a national holiday, the payment is made on the working day after the payment due date.

- SMF Loan Mudharabah Muqayadah FLPP 2023

Based on loan agreement No. 006/FLPP/PP/SMF-BTNS/II/2023 and No. 03/PKS/DIR/2023 dated January 17, 2023, the Bank received a loan which is intended for distributing housing loans for low-income communities.

This disbursement of facility is carried out during the *availability period* until December 29, 2023. The outstanding balance as of December 31, 2023 is amounting to Rp1,316,435 with a profit sharing ratio of 22.25%, which is calculated from profit sharing income offered for financing facilities drawn during *availability period* or an equivalent of 4.45% per annum for a maximum period of 20 (twenty) years. Loan repayments (principal and interest instalments) to SMF are held no later than the 10th of each month, if the due date of principal and interest payments falls on a national holiday, the payment is made on the working day after the payment due date.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

24. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

e. Pinjaman dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (SMF) (lanjutan)

Bank memiliki beberapa perjanjian pinjaman dengan SMF sebagai berikut (lanjutan):

- Pinjaman SMF FLPP 2022

Berdasarkan perjanjian No. 016/FLPP/PP/SMF-BTN/I/2022 dan No. 02/PKS/DIR/ 2022 tanggal 6 Januari 2022, Bank mendapatkan pinjaman dalam rangka penyaluran kredit pemilikan rumah sejahtera untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Pencairan atas fasilitas ini dilakukan selama *availability period* sampai dengan tanggal 31 Desember 2022. Saldo pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp4.302.198 dan Rp4.493.322 dengan suku bunga paling rendah sebesar 4,45% dengan jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun. Pengembalian dana pinjaman (angsuran pokok dan bunga) kepada SMF dilaksanakan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya, apabila tanggal jatuh tempo pembayaran pokok dan bunga jatuh pada hari libur nasional, maka pembayaran dilakukan pada hari kerja sesudah tanggal jatuh tempo pembayaran.

- Pinjaman SMF Mudharabah Muqayadah FLPP 2022

Berdasarkan perjanjian No. 017/FLPP/AKAD/SMF-BTNS/I/2022 dan No. 04/ PKS/DIR/2022 tanggal 6 Januari 2022, Bank mendapatkan pinjaman dalam rangka penyaluran kredit pemilikan rumah sejahtera untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

24. FUND BORROWINGS (continued)

e. Loan from PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (SMF) (continued)

The Bank has several loan agreements with SMF as follow (continued):

- SMF FLPP Year 2022

Based on loan agreement No. 016/FLPP/PP/SMF-BTN/I/2022 and No. 02/PKS/DIR/2022 dated January 6, 2022, the Bank received a loan which is intended for distributing housing loans for low-income communities.

This disbursement of facility is carried out during the *availability period* until December 31, 2022. The outstanding balance as of December 31, 2023 and 2022 is amounting to Rp4,302,198 and Rp4,493,322 with the lowest interest rate of 4.45% for a maximum period of 20 (twenty) years. Loan repayments (principal and interest installments) to SMF is no later than the 10th of each month, if the due date of principal and interest payments falls on a national holiday, the payment is made on the working day after the payment due date.

- SMF Loan Mudharabah Muqayadah FLPP 2022

Based on loan agreement No. 017/FLPP/AKAD/SMF-BTNS/I/2022 and No. 04/PKS/DIR/2022 dated January 6, 2022, the Bank received a loan which is intended for distributing housing loans for low-income communities.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

24. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

e. Pinjaman dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (SMF) (lanjutan)

Bank memiliki beberapa perjanjian pinjaman dengan SMF sebagai berikut (lanjutan):

- Pinjaman SMF *Mudharabah Muqayadah* FLPP 2022 (lanjutan)

Pencairan atas fasilitas ini dilakukan selama *availability period* sampai dengan tanggal 31 Desember 2022. Saldo pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp944.879 dan Rp990.267 dengan nisbah bagi hasil sebesar 22,25% yang dihitung dari pendapatan bagi hasil yang ditawarkan atas fasilitas pembiayaan yang ditarik selama *availability period* atau dengan ekuivalen sebesar setara dengan 4,45% per dengan jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun. Pengembalian dana pinjaman (angsuran pokok dan bunga) kepada SMF dilaksanakan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya, apabila tanggal jatuh tempo pembayaran pokok dan bunga jatuh pada hari libur nasional, maka pembayaran dilakukan pada hari kerja sesudah tanggal jatuh tempo pembayaran.

- Pinjaman SMF FLPP 2021

Berdasarkan perjanjian No. 069/FLPP/PP/SMF-BTN/IV/2021 tanggal 14 April 2021, Bank mendapatkan pinjaman dalam rangka penyaluran kredit kepemilikan rumah sejahtera untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Pencairan atas fasilitas ini dilakukan selama *availability period* sampai dengan tanggal 31 Desember 2021. Saldo pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp3.170.553 dan Rp3.328.337 dengan suku bunga paling rendah sebesar 4,45% dengan jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun. Pengembalian dana pinjaman (angsuran pokok dan bunga) kepada SMF dilaksanakan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya, apabila tanggal jatuh tempo pembayaran pokok dan bunga jatuh pada hari libur nasional, maka pembayaran dilakukan pada hari kerja sesudah tanggal jatuh tempo pembayaran.

24. FUND BORROWINGS (continued)

e. Loan from PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (SMF) (continued)

The Bank has several loan agreements with SMF as follow (continued):

- SMF Loan *Mudharabah Muqayadah* FLPP 2022 (continued)

This disbursement of facility is carried out during the *availability period* until December 31, 2022. The outstanding balance as of December 31, 2023 and 2022 is amounting to Rp944,879 and Rp990,267 with a profit sharing ratio of 22.25%, which is calculated from profit sharing income offered for financing facilities drawn during *availability period* or an equivalent of 4.45% per annum for a maximum period of 20 (twenty) years. Loan repayments (principal and interest instalments) to SMF are held no later than the 10th of each month, if the due date of principal and interest payments falls on a national holiday, the payment is made on the working day after the payment due date.

- SMF Loan FLPP 2021

Based on loan agreement No. 069/FLPP/PP/SMF-BTN/IV/2021 dated April 14, 2021, the Bank received a loan which is intended for distributing housing loans for low-income communities.

This disbursement of facility is carried out during the *availability period* until December 31, 2021. The outstanding balance as of December 31, 2023 and 2022 is amounting to Rp3,170,553 and Rp3,328,337 with the lowest interest rate of 4.45% for a maximum period of 20 (twenty) years. Loan repayments (principal and interest instalments) to SMF is no later than the 10th of each month, if the due date of principal and interest payments falls on a national holiday, the payment is made on the working day after the payment due date.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

24. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

e. Pinjaman dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (SMF) (lanjutan)

Bank memiliki beberapa perjanjian pinjaman dengan SMF sebagai berikut (lanjutan):

- Pinjaman SMF FLPP 2020

Berdasarkan perjanjian No. 010/FLPP/PP/SMF-BTN/II/2020 tanggal 20 Januari 2020, Bank mendapatkan pinjaman dalam rangka penyaluran kredit pemilikan rumah Sejahtera untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Pencairan atas fasilitas ini dilakukan selama *availability period* sampai dengan tanggal 31 Desember 2020. Saldo pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp809.252 dan Rp854.264 dengan suku bunga paling rendah sebesar 4,45% dengan jangka waktu paling lama 15 (lima belas) tahun. Pengembalian dana pinjaman (angsuran pokok dan bunga) kepada SMF dilaksanakan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya, apabila tanggal jatuh tempo pembayaran pokok dan bunga jatuh pada hari libur nasional, maka pembayaran dilakukan pada hari kerja sesudah tanggal jatuh tempo pembayaran.

- Pinjaman SMF Mudharabah Muqayadah FLPP 2021

Berdasarkan perjanjian No. 069A/FLPP/AKAD/SMF-BTN/IV/2021 tanggal 21 April 2021, Bank mendapatkan pinjaman dalam rangka penyaluran kredit pemilikan rumah sejahtera untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

24. FUND BORROWINGS (continued)

e. Loan from PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (SMF) (continued)

The Bank has several loan agreements with SMF as follow (continued):

- SMF FLPP Year 2020

Based on loan agreement No. 010/FLPP/PP/SMF-BTN/II/2020 dated January 20, 2020, the Bank received a loan which is intended for distributing housing loans for low-income communities.

This disbursement of facility is carried out during the *availability period* until December 31, 2020. The outstanding balance as of December 31, 2023 and 2022 is amounting to Rp809,252 and Rp854,264 with the lowest interest rate of 4.45% for a maximum period of 15 (fifteen) years. Loan repayments (principal and interest instalments) to SMF is no later than the 10th of each month, if the due date of principal and interest payments falls on a national holiday, the payment is made on the working day after the payment due date.

- SMF Loan Mudharabah Muqayadah FLPP 2021

Based on loan agreement No. 069A/FLPP/AKAD/SMF-BTN/IV/2021 dated April 21, 2021, the Bank received a loan which is intended for distributing housing loans for low-income communities.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

24. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

e. Pinjaman dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (pihak berelasi) (SMF) (lanjutan)

Bank memiliki beberapa perjanjian pinjaman dengan SMF sebagai berikut (lanjutan):

- Pinjaman SMF *Mudharabah Muqayadah FLPP 2021* (lanjutan)

Pencairan atas fasilitas ini dilakukan selama *availability period* sampai dengan tanggal 31 Desember 2020. Saldo pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp673.030 dan Rp710.998 dengan nisbah bagi hasil sebesar 22,25% yang dihitung dari pendapatan bagi hasil yang ditawarkan atas fasilitas pembiayaan yang ditarik selama *availability period* atau dengan ekuivalen sebesar setara dengan 4,45% per dengan jangka waktu paling lama 15 (lima belas) tahun. Pengembalian dana pinjaman (angsuran pokok dan bunga) kepada SMF dilaksanakan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya, apabila tanggal jatuh tempo pembayaran pokok dan bunga jatuh pada hari libur nasional, maka pembayaran dilakukan pada hari kerja sesudah tanggal jatuh tempo pembayaran.

- *Refinancing 1 SMF 2021*

Berdasarkan perjanjian No.124/PP/SMF-BTN/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021, Bank mendapatkan pinjaman dengan plafon sebesar Rp500 miliar (angka penuh) dan Rp1.000 miliar (angka penuh) dengan bunga tetap 5,70% dan 5,95% yang akan jatuh tempo pada tanggal 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2024.

Bank telah melakukan pelunasan atas pinjaman tersebut saat jatuh tempo pada tanggal 30 Juni 2023 sebesar Rp500 miliar (angka penuh).

24. FUND BORROWINGS (continued)

e. Loan from PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (related parties) (SMF) (continued)

The Bank has several loan agreements with SMF as follow (continued):

- SMF Loan *Mudharabah Muqayadah FLPP 2021* (continued)

This disbursement of facility is carried out during the *availability period* until December 31, 2020. The outstanding balance as of December 31, 2023 and 2022 is amounting to Rp673,030 and Rp710,998 with a profit sharing ratio of 22.25%, which is calculated from profit sharing income offered for financing facilities drawn during *availability period* or an equivalent of 4.45% per annum for a maximum period of 15 (fifteen) years. Loan repayments (principal and interest instalments) to SMF are held no later than the 10th of each month, if the due date of principal and interest payments falls on a national holiday, the payment is made on the working day after the payment due date.

- *Refinancing 1 SMF 2021*

Based on loan agreement No.124/PP/SMF-BTN/VI/2021 dated June 30, 2021, the Bank received a loan with plafond amounting to Rp500 billion (full amount) and Rp1,000 billion (full amount) with interest rate of 5.70% and 5.95% and will mature on June 30, 2023 and June 30, 2024.

The Bank has fully repaid the loan at maturity date on June 30, 2023 amounting to Rp500 billion (full amount).

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

24. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

e. Pinjaman dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (pihak berelasi) (SMF) (lanjutan)

Bank memiliki beberapa perjanjian pinjaman dengan SMF sebagai berikut (lanjutan):

- *Refinancing 2 SMF 2021*

Berdasarkan perjanjian No.254/PP/SMF-BTN/XII/2021 tanggal 28 Desember 2021, Bank mendapatkan pinjaman dengan plafon sebesar Rp200 miliar (angka penuh) dengan bunga tetap 4% yang akan jatuh tempo pada tanggal 28 Desember 2022.

Bank telah melakukan pelunasan atas pinjaman tersebut saat jatuh tempo pada tanggal 28 Desember 2022 sebesar Rp200 miliar (angka penuh).

- *Refinancing 1 SMF 2022*

Berdasarkan perjanjian No.119/PP/SMF-BTN/IV/2022 tanggal 28 April 2022, Bank mendapatkan pinjaman dengan plafon sebesar Rp2 triliun (angka penuh) dengan bunga tetap 5,60% yang akan jatuh tempo pada tanggal 28 April 2025.

- *Pinjaman SMF FLPP 2019*

Berdasarkan perjanjian No. 099/PP/FLPP/SMF-BTN/II/2019 tanggal 17 Januari 2019, Bank mendapatkan pinjaman dalam rangka penyaluran kredit pemilikan rumah sejahtera untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Pencairan atas fasilitas ini dilakukan selama *availability period* sampai dengan tanggal 31 Desember 2023. Saldo pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp755.927 dan Rp803.296 dengan suku bunga paling rendah sebesar 4,45% dengan jangka waktu paling lama 15 (lima belas) tahun. Pengembalian dana pinjaman (angsuran pokok dan bunga) kepada SMF dilaksanakan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya, apabila tanggal jatuh tempo pembayaran pokok dan bunga jatuh pada hari libur nasional, maka pembayaran dilakukan pada hari kerja sesudah tanggal jatuh tempo pembayaran.

24. FUND BORROWINGS (continued)

e. Loan from PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (related parties) (SMF) (continued)

The Bank has several loan agreements with SMF as follow (continued):

- *Refinancing 2 SMF 2021*

Based on loan agreement No.254/PP/SMF-BTN/XII/2021 dated December 28, 2021, the Bank received a loan with plafond amounting to Rp200 billion (full amount) with interest rate of 4% and will mature on December 28, 2022.

The Bank has fully repaid the loan at maturity date on December 28, 2022 amounting to Rp200 billion (full amount).

- *Refinancing 1 SMF 2022*

Based on loan agreement No. 119/PP/SMF-BTN/IV/2022 dated April 28, 2022, the Bank received a loan with plafond amounting to Rp2 trillion (full amount) with interest rate of 5.60% and will mature on April 28, 2025.

- *SMF Loan FLPP 2019*

Based on loan agreement 099/PP/FLPP/SMF-BTN/II/2019 dated January 17, 2019, the Bank received a loan which is intended for distributing housing loans for low-income communities.

This disbursement of facility is carried out during the *availability period* until December 31, 2019. The outstanding balance as of December 31, 2023 and 2022 is amounting to Rp755,927 and Rp803,296 respectively, with the lowest interest rate of 4.45% for a maximum period of 15 (fifteen) years. Loan repayments (principal and interest installments) to SMF is no later than the 10th of each month, if the due date of principal and interest payments falls on a national holiday, the payment is made on the working day after the payment due date.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

24. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

e. Pinjaman dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (SMF) (lanjutan)

Bank memiliki beberapa perjanjian pinjaman dengan SMF sebagai berikut (lanjutan):

- Pinjaman SMF *Mudharabah Muqayadah*

Berdasarkan perjanjian No. 179/AKAD/SMF-BTNS/IX/2021 tanggal 15 September 2021, Bank mendapatkan pinjaman dengan plafon sebesar Rp100 miliar (angka penuh) dengan nisbah bagi hasil sebesar 53,17% dan akan jatuh tempo pada tanggal 16 September 2022.

Bank telah melakukan pelunasan atas pinjaman tersebut saat jatuh tempo pada tanggal 16 September 2022 sebesar Rp100 miliar (angka penuh).

- Pinjaman SMF *Mudharabah Muqayadah FLPP 2020*

Berdasarkan perjanjian No.024/FLPP/AKAD/SMF-BTNSy/I/2020 tanggal 29 Januari 2020, Bank mendapatkan pinjaman dalam rangka penyaluran kredit pemilikan rumah sejahtera untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Pencairan atas fasilitas ini dilakukan selama *availability period* sampai dengan tanggal 31 Desember 2020. Saldo pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp158.041 and Rp168.256 dengan nisbah bagi hasil sebesar 22,25% yang dihitung dari pendapatan bagi hasil yang ditawarkan atas fasilitas pembiayaan yang ditarik selama *availability period* atau dengan ekuivalen sebesar setara dengan 4,45% per tahun dengan pendapatan yang dibagikan yang menggunakan rata-rata tingkat imbal hasil kas efektif dari Pembiayaan KPR Sejahtera sebesar setara dengan 5% per tahun dengan jangka waktu paling lama 15 (lima belas) tahun. Pengembalian dana pinjaman (angsuran pokok dan bunga) kepada SMF dilaksanakan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya, apabila tanggal jatuh tempo pembayaran pokok dan bunga jatuh pada hari libur nasional, maka pembayaran dilakukan pada hari kerja sesudah tanggal jatuh tempo pembayaran.

24. FUND BORROWINGS (continued)

e. Loan from PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (SMF) (continued)

The Bank has several loan agreements with SMF as follow (continued):

- SMF Loan *Mudharabah Muqayadah*

Based on loan agreement No. 179/AKAD/SMF-BTNS/IX/2021 dated September 15, 2021, the Bank received loan with *plafond* amounting to Rp100 billion (full amount) with *nisbah ratio* 53.17% and will mature on September 16, 2022.

The Bank has fully repaid the loan at maturity date on September 16, 2022 amounting to Rp100 billion (full amount).

- SMF Loan *Mudharabah Muqayadah FLPP 2020*

Based on loan agreement No. 024/FLPP/AKAD/SMF-BTNSy/I/2020 dated January 29, 2020, the Bank received a loan which is intended for distributing housing loans for low-income communities.

This disbursement of facility is carried out during the *availability period* until December 31, 2020. The outstanding balance as of December 31, 2023 and 2022 is amounting to Rp158,041 and Rp168,256 with a *profit sharing ratio* of 22.25%, which is calculated from *profit sharing income* offered for financing facilities drawn during *availability period* or an equivalent of 4.45% per annum with revenue divided by using the average yield rate effective financing for KPR Sejahtera Financing equal to 5% per year for a maximum period of 15 (fifteen) years. Loan repayments (principal and interest instalments) to SMF are held no later than the 10th of each month, if the due date of principal and interest payments falls on a national holiday, the payment is made on the working day after the payment due date.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

24. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

e. Pinjaman dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (SMF) (lanjutan)

Bank memiliki beberapa perjanjian pinjaman dengan SMF sebagai berikut (lanjutan):

- Pinjaman SMF FLPP 2018

Berdasarkan perjanjian No. 81/PP/SMF-BTN/VIII/2018 tanggal 14 Agustus 2018, Bank mendapatkan pinjaman dalam rangka penyaluran kredit pemilikan rumah sejahtera untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Pencairan atas fasilitas ini dilakukan selama *availability period* sampai dengan tanggal 28 Desember 2018. Saldo pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp571.300 dan Rp607.414 dengan suku bunga paling rendah sebesar 4,45% dengan jangka waktu paling lama 15 (lima belas) tahun. Pengembalian dana pinjaman (angsuran pokok dan bunga) kepada SMF dilaksanakan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya, apabila tanggal jatuh tempo pembayaran pokok dan bunga jatuh pada hari libur nasional, maka pembayaran dilakukan pada hari kerja sesudah tanggal jatuh tempo pembayaran.

- Pinjaman SMF Mudharabah Muqayadah FLPP 2018

Berdasarkan perjanjian No.103A/AKAD/SMF-BTNSy/VIII/2018 tanggal 14 Agustus 2018, Bank mendapatkan pinjaman dalam rangka penyaluran kredit pemilikan rumah sejahtera untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

24. FUND BORROWINGS (continued)

e. Loan from PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (SMF) (continued)

The Bank has several loan agreements with SMF as follow (continued):

- SMF Loan FLPP 2018

Based on loan agreement No. 81/PP/SMF-BTN/VIII/2018 dated August 14, 2018, the Bank received a loan which is intended for distributing housing loans for low-income communities.

This disbursement of facility is carried out during the *availability period* until December 28, 2018. The Outstanding Balance as of December 31, 2023 and 2022 amounting to Rp571,300 and Rp607,414, respectively with the lowest interest rate of 4.45% for a maximum period of 15 (fifteen) years. Loan repayments (principal and interest instalments) to the SMF are held no later than the 10th of each month, if the due date of principal and interest payments falls on a national holiday, the payment is made on the working day after the payment due date.

- SMF Loan Mudharabah Muqayadah FLPP 2018

Based on loan agreement No.103A/AKAD/SMF-BTNSy/VIII/2018 dated August 14, 2018, the Bank received a loan which is intended for distributing housing loans for low-income communities.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

24. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

e. Pinjaman dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (SMF) (lanjutan)

Bank memiliki beberapa perjanjian pinjaman dengan SMF sebagai berikut (lanjutan):

- Pinjaman SMF Mudharabah Muqayadah FLPP 2018 (lanjutan)

Pencairan atas fasilitas ini dilakukan selama *availability period* sampai dengan tanggal 28 Desember 2018. Saldo pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp24.733 dan Rp26.616 dengan *nisbah* bagi hasil sebesar 22,25% yang dihitung dari pendapatan bagi hasil yang ditawarkan atas fasilitas pembiayaan yang ditarik selama *availability period* atau dengan ekuivalen sebesar setara dengan 4,45% per tahun dengan pendapatan yang dibagihasilkan yang menggunakan rata-rata tingkat imbal hasil kas efektif dari Pembiayaan KPR Sejahtera sebesar setara dengan 5% per tahun dengan jangka waktu paling lama 15 (lima belas) tahun. Pengembalian dana pinjaman (angsuran pokok dan bunga) kepada SMF dilaksanakan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya, apabila tanggal jatuh tempo pembayaran pokok dan bunga jatuh pada hari libur nasional, maka pembayaran dilakukan pada hari kerja sesudah tanggal jatuh tempo pembayaran.

- Pinjaman SMF Mudharabah Muqayadah FLPP 2019

Berdasarkan perjanjian No. 017A/AKAD/FLPP/SMF-BTNSy/II/2019 tanggal 21 Januari 2019, Bank mendapatkan pinjaman dalam rangka penyaluran kredit pemilikan rumah sejahtera untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

24. FUND BORROWINGS (continued)

e. Loan from PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (SMF) (continued)

The Bank has several loan agreements with SMF as follow (continued):

- SMF Loan Mudharabah Muqayadah FLPP 2018 (continued)

This disbursement of facility is carried out during the *availability period* until December 28, 2018. The outstanding balance as of December 31, 2023 and 2022 is amounting to Rp24,733 and Rp26,616 respectively with a profit sharing ratio of 22.25%, which is calculated from profit sharing income offered for financing facilities drawn during *availability period* or an equivalent of 4.45% per annum with revenue divided by using the average yield rate effective cash financing for KPR Sejahtera Financing equal to 5% per year for a maximum period of 15 (fifteen) years. Loan repayments (principal and interest instalments) to the SMF are held no later than the 10th of each month, if the due date of principal and interest payments falls on a national holiday, the payment is made on the working day after the payment due date.

- SMF Loan Mudharabah Muqayadah FLPP 2019

Based on loan agreement No. 017A/AKAD/FLPP/SMF-BTNSy/II/2019 dated January 21, 2019, the Bank received a loan which is intended for distributing housing loans for low-income communities.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

24. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

e. Pinjaman dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (SMF) (lanjutan)

Bank memiliki beberapa perjanjian pinjaman dengan SMF sebagai berikut (lanjutan):

- Pinjaman SMF *Mudharabah Muqayadah* FLPP 2019 (lanjutan)

Pencairan atas fasilitas ini dilakukan selama *availability period* sampai dengan tanggal 31 Desember 2019. Saldo pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp88.938 dan Rp95.575 dengan *nisbah* bagi hasil sebesar 22,25% yang dihitung dari pendapatan bagi hasil yang ditawarkan atas fasilitas pembiayaan yang ditarik selama *availability period* atau dengan ekuivalen sebesar setara dengan 4,45% per tahun dengan pendapatan yang dibagihasilkan yang menggunakan rata-rata tingkat imbal hasil kas efektif dari Pembiayaan KPR Sejahtera sebesar setara dengan 5% per tahun dengan jangka waktu paling lama 15 (lima belas) tahun. Pengembalian dana pinjaman (angsuran pokok dan bunga) kepada SMF dilaksanakan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya, apabila tanggal jatuh tempo pembayaran pokok dan bunga jatuh pada hari libur nasional, maka pembayaran dilakukan pada hari kerja sesudah tanggal jatuh tempo pembayaran.

- Pinjaman SMF *Mudharabah Muqayadah* FLPP Percepatan 2019

Berdasarkan perjanjian No. 216/FLPP/AKAD/SMF-BTN/XII/2019 tanggal 20 Desember 2019, Bank mendapatkan pinjaman dalam rangka penyaluran kredit pemilikan rumah sejahtera untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

24. FUND BORROWINGS (continued)

e. Loan from PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (SMF) (continued)

The Bank has several loan agreements with SMF as follow (continued):

- SMF Loan *Mudharabah Muqayadah* FLPP 2019 (continued)

This disbursement of facility is carried out during the *availability period* until December 31, 2019. The outstanding balance as of December 31, 2023 and 2022 is Rp88,938 and Rp95,575, respectively with a profit sharing ratio of 22.25%, which is calculated from profit sharing income offered for financing facilities drawn during *availability period* or an equivalent of 4.45% per annum with revenue divided by using the average yield rate effective cash financing for KPR Sejahtera Financing equal to 5% per year for a maximum period of 15 (fifteen) years. Loan repayments (principal and interest instalments) to the SMF are held no later than the 10th of each month, if the due date of principal and interest payments falls on a national holiday, the payment is made on the working day after the payment due date.

- SMF Loan *Mudharabah Muqayadah* FLPP Percepatan 2019

Based on loan agreement No. 216/FLPP/AKAD/SMF-BTN/XII/2019 dated December 20, 2019, the Bank received loan which is intended for distributing housing loans for low-income communities.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

24. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

e. Pinjaman dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (SMF) (lanjutan)

Bank memiliki beberapa perjanjian pinjaman dengan SMF sebagai berikut (lanjutan):

- Pinjaman SMF *Mudharabah Muqayadah* FLPP Percepatan 2019 (lanjutan)

Pencairan atas fasilitas ini dilakukan selama *availability period* sampai dengan tanggal 31 Desember 2019. Saldo pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp24.497 dan Rp26.238 dengan nisbah bagi hasil sebesar 22,25% yang dihitung dari pendapatan bagi hasil yang ditawarkan atas fasilitas pembiayaan yang ditarik selama *availability period* atau dengan ekuivalen sebesar setara dengan 4,45% per tahun dengan pendapatan yang dibagikan yang menggunakan rata-rata tingkat imbal hasil kas efektif dari Pembiayaan KPR Sejahtera sebesar setara dengan 5% per tahun dengan jangka waktu paling lama 15 (lima belas) tahun. Pengembalian dana pinjaman (angsuran pokok dan bunga) kepada SMF dilaksanakan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya, apabila tanggal jatuh tempo pembayaran pokok dan bunga jatuh pada hari libur nasional, maka pembayaran dilakukan pada hari kerja sesudah tanggal jatuh tempo pembayaran.

- Pinjaman SMF FLPP Percepatan 2019

Berdasarkan perjanjian No. 203/FLPP/PP/SMF-BTN/XI/2019 tanggal 28 November 2019, Bank mendapatkan pinjaman dalam rangka penyaluran kredit pemilikan rumah sejahtera untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

24. FUND BORROWINGS (continued)

e. Loan from PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (SMF) (continued)

The Bank has several loan agreements with SMF as follow (continued):

- SMF Loan *Mudharabah Muqayadah* FLPP Percepatan 2019 (continued)

This disbursement of facility is carried out during the *availability period* until December 31, 2019. The outstanding balance as of December 31, 2023 and 2022 is Rp24,497 and Rp26,238 with a profit sharing ratio of 22.25%, which is calculated from profit sharing income offered for financing facilities drawn during *availability period* or an equivalent of 4.45% per annum with revenue divided by using the average yield rate effective cash financing for KPR Sejahtera Financing equal to 5% per year for a maximum period of 15 (fifteen) years. Loan repayments (principal and interest instalments) to the SMF are held no later than the 10th of each month, if the due date of principal and interest payments falls on a national holiday, the payment is made on the working day after the payment due date.

- SMF Loan FLPP Percepatan 2019

Based on loan agreement No. 203/FLPP/PP/SMF-BTN/XI/2019 dated November 28, 2019, the Bank received a loan which is intended for distributing housing loans for low-income communities.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

24. PINJAMAN YANG DITERIMA (lanjutan)

e. Pinjaman dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (SMF) (lanjutan)

Bank memiliki beberapa perjanjian pinjaman dengan SMF sebagai berikut (lanjutan):

- Pinjaman SMF FLPP Percepatan 2019 (lanjutan)

Pencairan atas fasilitas ini dilakukan selama *availability period* sampai dengan tanggal 31 Desember 2019. Saldo pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp373.929 dan Rp396.120 dengan suku bunga paling rendah sebesar 4,45% dengan jangka waktu paling lama 15 (lima belas) tahun. Pengembalian dana pinjaman (angsuran pokok dan bunga) kepada SMF dilaksanakan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya, apabila tanggal jatuh tempo pembayaran pokok dan bunga jatuh pada hari libur nasional, maka pembayaran dilakukan pada hari kerja sesudah tanggal jatuh tempo pembayaran.

Pinjaman yang diterima dari pihak-pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp22.453.290 dan Rp17.455.685 (Catatan 43).

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Bank telah memenuhi ketentuan dan kondisi yang ada dalam seluruh perjanjian pinjaman yang diterima.

24. FUND BORROWINGS (continued)

e. Loan from PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (SMF) (continued)

The Bank has several loan agreements with SMF as follow (continued):

- SMF Loan FLPP Percepatan 2019 (continued)

This disbursement of facility is carried out during the *availability period* until December 31, 2019. The Outstanding Balance as of December 31, 2023 and 2022 is amounting to Rp373,929 and Rp396,120, respectively with the lowest interest rate of 4.45% for a maximum period of 15 (fifteen) years. Loan repayments (principal and interest installments) to SMF is no later than the 10th of each month, if the due date of principal and interest payments falls on a national holiday, the payment is made on the working day after the payment due date.

As of December 31, 2023 and 2022, fund borrowings received from related parties amounted to Rp22,453,290 and Rp17,455,685, respectively (Note 43).

As of December 31, 2023 and 2022, the Bank has complied with all of the existing terms and condition of the fund borrowing agreements.

25. PINJAMAN DAN EFEK-EFEK SUBORDINASI

25. SUBORDINATED LOAN AND SECURITIES

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
<u>Mata Uang Asing</u>			<u>Foreign Currency</u>
<u>Pihak Ketiga</u>			<u>Third Parties</u>
Obligasi Subordinasi	4.612.840	4.658.242	Subordinated bonds
<u>Rupiah</u>			<u>Rupiah</u>
<u>Pihak Berelasi (Catatan 43)</u>			<u>Related Party (Note 43)</u>
Pinjaman Subordinasi dari			Subordinated Loan from
PT Sarana Multigriya Finansial			PT Sarana Multigriya Finansial
(Persero)	4.499.997	4.499.977	(Persero)
Total	9.112.837	9.158.219	Total

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

25. PINJAMAN DAN EFEK-EFEK SUBORDINASI
(lanjutan)

a. Pinjaman Subordinasi PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (SMF)

Akun ini merupakan fasilitas pemberian Pinjaman Subordinasi yang diperoleh dari PT SMF (Persero) yang ditujukan untuk mendukung Program Sejuta Rumah. Pinjaman Subordinasi sebesar Rp3.000.000 dengan suku bunga 8,90% dilakukan pencairan pada tanggal 27 Desember 2019 yang akan jatuh tempo pada tanggal 27 Desember 2024. Pada tanggal 15 November 2021, Bank melakukan pencairan Pinjaman Subordinasi pada tanggal 15 November 2021 sebesar Rp1.500.000 dengan suku bunga 7,65% yang akan jatuh tempo pada tanggal 15 November 2026.

Pinjaman subordinasi ini telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui surat No. S-69/PB.31/2016 tanggal 30 September 2016 dan No. S-21/PB.31/2020 tanggal 4 Februari 2020 dan No. S-261/PB.31/2021 tanggal 25 November 2021.

b. Obligasi Subordinasi

Pada tanggal 23 Januari 2020, Bank telah menerbitkan obligasi subordinasi sebesar ASD300 juta atau ekuivalen Rp4.089.000 dengan tenor 5 tahun dan bunga 4,20% per tahun dan dicatatkan di Bursa Efek Singapura. Penerbitan Obligasi tersebut telah dinyatakan efektif berdasarkan surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-35/PB.31/ 2020 tanggal 26 Februari 2020.

Biaya penerbitan obligasi subordinasi tersebut sebesar Rp23.866 dicatat mengurangi nilai obligasi subordinasi dan akan diamortisasi sampai dengan tanggal jatuh tempo pada 23 Januari 2025.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Bank telah memenuhi ketentuan dan kondisi yang ada dalam seluruh perjanjian pinjaman subordinasi yang diterima.

Bank melakukan lindung nilai arus kas atas pokok dan bunga dari sebagian porsi obligasi subordinasi (Catatan 12).

25. SUBORDINATED LOAN AND SECURITIES
(continued)

a. PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (SMF) Subordinated Loan

This account is a subordinated loan that was obtained from PT SMF (Persero) that is aimed to support the one million housing program. Subordinated loan in the amount of Rp3,000,000 with interest rate of 8.90% was withdrawn on December 27, 2019 and will mature on December 27, 2024. On 15 November 2021, Bank disburse Subordinated Loan amounting Rp1,500,000 with interest rate 7.65% mature on November 15, 2026.

Subordinated loan has been approved by Financial Service Authority through letter No. S-69/PB.31/2016 dated September 30, 2016 and No. S-21/PB.31/2020 dated February 4, 2020 and No. S-261/PB.31/2021 dated November 25, 2021.

b. Subordinated Bonds

On January 23, 2020, the Bank issued subordinated bonds with a total nominal value of USD300 million or the equivalent to Rp4,089,000, with tenor of 5 years and interest of 4.20% per annum and listed in the Singapore Stock Exchange. The issuance of Global Bond became effective based on letter No. S-35/PB.31/2020 dated February 26, 2020.

The issuance costs of the subordinated bonds amounting to Rp23,866 was recorded as deduction to the amount of the subordinated bonds and amortised until the maturity date on January 23, 2025.

As of December 31, 2023 and 2022, the Bank has complied with all of the existing terms and conditions of the subordinated loan agreements.

Bank entered into partial cashflow hedge for principal and interest of subordinated bond (Note 12).

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

26. BUNGA YANG MASIH HARUS DIBAYAR

26. INTEREST PAYABLE

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
Deposito berjangka	324.118	334.877	Time deposits
Pinjaman subordinasi dan efek-efek subordinasi	113.839	114.971	Subordinated loan and securities
Pinjaman yang diterima	81.069	51.072	Fund borrowings
Surat-surat berharga yang diterbitkan	71.460	79.538	Securities issued
Derivatif	57.010	48.908	Derivative
Total	647.496	629.366	Total

27. ESTIMASI KERUGIAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI

27. ESTIMATED LOSSES ON COMMITMENTS AND CONTINGENCIES

Kolektibilitas garansi yang diterbitkan dan fasilitas kredit yang belum ditarik yang mempunyai risiko kredit adalah sebagai berikut:

The collectibility classification of guarantees issued and unused loan facility bearing credit risks are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2023		31 Desember/ December 31, 2022	
	Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount in foreign currencies (angka penuh/ full amount)	Ekuivalen/ Equivalent Rupiah	Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount in foreign currencies (angka penuh/ full amount)	Ekuivalen/ Equivalent Rupiah
<u>Lancar</u> <u>Rupiah</u>				
Garansi yang diterbitkan (Catatan 39)	2.112.148		887.321	
Fasilitas kredit yang belum ditarik (<i>committed</i>)	127.083		67.928	
Irrevocable L/C yang masih berjalan (Catatan 39)	20.106		221.484	
	2.259.337		1.176.733	
<u>Mata uang asing</u>				
Garansi yang diterbitkan (Catatan 39)				
Dolar Amerika Serikat	30.269.447	466.059	3.869.076	60.232
Euro Eropa	56.784	968	56.784	942
	467.027		61.174	
	2.726.364		1.237.907	
<u>Dalam Perhatian Khusus</u> <u>Rupiah</u>				
Fasilitas kredit yang belum ditarik (<i>committed</i>)	-		12.200	
Total	2.726.364		1.250.107	

Current
Rupiah

Guarantees issued (Note 39)

Unused loan facility (*committed*)

Outstanding irrevocable

L/Cs (Note 39)

Foreign currencies

Guarantees issued (Note 39)

United States Dollar

European Euro

Special mention

Rupiah

Unused loan facility (*committed*)

Total

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 tidak terdapat transaksi dengan pihak-pihak berelasi untuk fasilitas kredit yang belum ditarik.

As of December 31, 2023 and 2022, there are no transaction with related parties for unused loan facility.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, garansi bank yang diterbitkan kepada pihak-pihak berelasi, masing-masing sebesar Rp1.116.581 dan Rp426.438 (Catatan 43).

As of December 31, 2023 and 2022, guarantees issued to related parties amounted to Rp1,116,581 and Rp426,438, respectively (Note 43).

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

27. ESTIMASI KERUGIAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

Perubahan nilai tercatat bruto adalah sebagai berikut:

27. ESTIMATED LOSSES ON COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

Movements in the gross carrying amount are as follows:

31 Desember/December 31, 2023						
	Stage 1	Stage 2	Stage 3	Syariah ^{*)}	Total	
Fasilitas kredit yang belum ditarik (committed)						Unused loan facility (committed)
Saldo Awal	80.128	-	-	-	80.128	Beginning balance
Pengalihan ke:						Transfer to:
Stage 1	-	-	-	-	-	Stage 1
Stage 2	-	-	-	-	-	Stage 2
Stage 3	-	-	-	-	-	Stage 3
Total saldo awal setelah pengalihan	80.128	-	-	-	80.128	Total opening balance after transfer
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	29.126	-	-	-	29.126	Net remeasurement of carrying amount
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	26.995	-	-	-	26.995	New financial assets originated or purchased
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(9.166)	-	-	-	(9.166)	Derecognized financial assets
Total Penambahan/(penurunan) tahun berjalan	46.955	-	-	-	46.955	Total additional/(reversal) during the year
Saldo akhir tahun	127.083	-	-	-	127.083**)	Balance at the end of year

*) Tidak menerapkan PSAK No. 71 "Instrumen Keuangan"

**) Terdiri dari fasilitas kredit yang committed yang belum ditarik

*) Not applying SFAS No. 71 "Financial Instruments"

**) Consist of committed unused loan facility

31 Desember/December 31, 2022						
	Stage 1	Stage 2	Stage 3	Syariah ^{*)}	Total	
Fasilitas kredit yang belum ditarik (committed)						Unused loan facility (committed)
Saldo Awal	89.811	8.123	-	-	97.934	Beginning balance
Pengalihan ke:						Transfer to:
Stage 1	8.123	(8.123)	-	-	-	Stage 1
Stage 3	-	-	-	-	-	Stage 3
Total saldo awal setelah pengalihan	97.934	-	-	-	97.934	Total opening balance after transfer
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	226	-	-	-	226	Net remeasurement of carrying amount
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	-	-	-	-	-	New financial assets originated or purchased
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(18.032)	-	-	-	(18.032)	Derecognized financial assets
Total Penambahan/(penurunan) tahun berjalan	(17.806)	-	-	-	(17.806)	Total additional/(reversal) during the year
Saldo akhir tahun	80.128	-	-	-	80.128**)	Balance at the end of year

*) Tidak menerapkan PSAK No. 71 "Instrumen Keuangan"

**) Terdiri dari fasilitas kredit yang committed yang belum ditarik

*) Not applying SFAS No. 71 "Financial Instruments"

**) Consist of committed unused loan facility

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

27. ESTIMASI KERUGIAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

Perubahan nilai tercatat bruto adalah sebagai berikut:

27. ESTIMATED LOSSES ON COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

Movements in the gross carrying amount are as follows:

31 Desember/December 31, 2023						
	Stage 1	Stage 2	Stage 3	Syariah ^{*)}	Total	
Irrevocable L/C yang masih berjalan						Outstanding irrevocable L/Cs
Saldo Awal	221.484	-	-	-	221.484	Beginning balance
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	(175.450)	-	-	-	(175.450)	Net remeasurement of carrying amount
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	460.627	-	-	-	460.627	New financial assets originated or purchased
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(486.555)	-	-	-	(486.555)	Derecognized financial assets
Total penambahan/(penurunan) tahun berjalan	(201.378)	-	-	-	(201.378)	Total additional/(reversal) during the period
Saldo akhir tahun	20.106	-	-	-	20.106	Balance at the end of year

*) Tidak menerapkan PSAK No. 71 "Instrumen Keuangan"

*) Not applying SFAS No. 71 "Financial Instruments"

31 Desember/December 31, 2022						
	Stage 1	Stage 2	Stage 3	Syariah ^{*)}	Total	
Irrevocable L/C yang masih berjalan						Outstanding irrevocable L/Cs
Saldo Awal	280.604	-	-	-	280.604	Beginning balance
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	(75.440)	-	-	-	(75.440)	Net remeasurement of carrying amount
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	683.151	-	-	-	638.151	New financial assets originated or purchased
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(666.830)	-	-	-	(666.830)	Derecognized financial assets
Total penambahan/(penurunan) tahun berjalan	(59.119)	-	-	-	(59.119)	Total additional/(reversal) during the year
Saldo akhir tahun	221.484	-	-	-	221.484	Balance at the end of year

*) Tidak menerapkan PSAK No. 71 "Instrumen Keuangan"

*) Not applying SFAS No. 71 "Financial Instruments"

Perubahan estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi adalah sebagai berikut:

The movements in the estimated for impairment losses on commitments and contingencies are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
Rupiah			Rupiah
Saldo awal tahun	4.719	3.644	Balance at beginning of year
Penyisihan/(pemulihan) kerugian penurunan nilai selama tahun berjalan	(1.139)	1.075	Provision/(reversal) for impairment losses during the year
Saldo akhir	3.580	4.719	Balance at the end

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

27. ESTIMASI KERUGIAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

Perubahan cadangan kerugian komitmen dan kontinjensi adalah sebagai berikut (lanjutan):

27. ESTIMATED LOSSES ON COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

The movements in the allowance for impairment losses on commitments and contingencies are as follows (continued):

31 Desember/December 31, 2023					
	Stage 1	Stage 2	Stage 3	Syariah ^{*)}	Total
Fasilitas kredit yang belum ditarik (committed)					
Saldo awal	4.607	-	-	-	4.607
Pengalihan ke:					
Stage 1	-	-	-	-	-
Stage 2	-	-	-	-	-
Stage 3	-	-	-	-	-
Total saldo awal setelah pengalihan	4.607	-	-	-	4.607
Pengukuran kembali bersih penurunan nilai	(992)	-	-	-	(992)
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	938	-	-	-	938
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(989)	-	-	-	(989)
Total Penambahan/(penurunan) tahun berjalan	(1.043)	-	-	-	(1.043)
Saldo akhir tahun	3.564	-	-	-	3.564

Unused loan facility (committed)
Beginning balance
Transfer to:
 Stage 1
 Stage 2
 Stage 3

Total opening balance after transfer

Net remeasurement of impairment losses
New financial assets originated or purchased
Derecognized financial asset

Total Additional/(reversal)/ during the year

Balance at the end of year

*) Tidak menerapkan PSAK No. 71 "Instrumen Keuangan"

*) Not applying SFAS No. 71 "Financial Instruments"

31 Desember/December 31, 2022					
	Stage 1	Stage 2	Stage 3	Syariah ^{*)}	Total
Fasilitas kredit yang belum ditarik (committed)					
Saldo awal	1.640	1.640	-	-	3.280
Pengalihan ke:					
Stage 1	1.640	(1.640)	-	-	-
Stage 3	-	-	-	-	-
Total saldo awal setelah pengalihan	3.280	-	-	-	3.280
Pengukuran kembali bersih penurunan nilai	1.792	-	-	-	1.792
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	-	-	-	-	-
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(465)	-	-	-	(465)
Total Penambahan/(penurunan) tahun berjalan	1.327	-	-	-	1.327
Saldo akhir tahun	4.607	-	-	-	4.607

Unused loan facility (committed)
Beginning balance
Transfer to:
 Stage 1
 Stage 3

Total opening balance after transfer

Net remeasurement of impairment losses
New financial assets originated or purchased
Derecognized financial asset

Total Additional/(reversal)/ during the year

Balance at the end of year

*) Tidak menerapkan PSAK No. 71 "Instrumen Keuangan"

*) Not applying SFAS No. 71 "Financial Instruments"

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

27. ESTIMASI KERUGIAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

Perubahan cadangan kerugian komitmen dan kontinjensi adalah sebagai berikut (lanjutan):

27. ESTIMATED LOSSES ON COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

The movements in the allowance for impairment losses on commitments and contingencies are as follows (continued):

31 Desember/December 31, 2023						
	Stage 1	Stage 2	Stage 3	Syariah ^{*)}	Total	
Irrevocable L/C yang masih berjalan						Outstanding irrevocable L/Cs
Saldo Awal	112	-	-	-	112	Beginning balance
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	(7.355)	-	-	-	(7.355)	Net remeasurement of carrying amount
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	7.567	-	-	-	7.567	New financial assets originated or purchased
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(308)	-	-	-	(308)	Derecognized financial assets
Total Penambahan/(penurunan) period berjalan	(96)	-	-	-	(96)	Total additional/(reversal) period the year
Saldo akhir tahun	16	-	-	-	16	Balance at the end of year

*) Tidak menerapkan PSAK No. 71 "Instrumen Keuangan"

*) Not applying SFAS No. 71 "Financial Instruments"

31 Desember/December 31, 2022						
	Stage 1	Stage 2	Stage 3	Syariah ^{*)}	Total	
Irrevocable L/C yang masih berjalan						Outstanding irrevocable L/Cs
Saldo Awal	364	-	-	-	364	Beginning balance
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	(83)	-	-	-	(83)	Net remeasurement of carrying amount
Aset keuangan baru yang diterbitkan atau dibeli	1.395	-	-	-	1.395	New financial assets originated or purchased
Aset keuangan yang dihentikan pengakuannya	(1.564)	-	-	-	(1.564)	Derecognized financial assets
Total Penambahan/(penurunan) period berjalan	(252)	-	-	-	(252)	Total additional/(reversal) period the year
Saldo akhir tahun	112	-	-	-	112	Balance at the end of year

*) Tidak menerapkan PSAK No. 71 "Instrumen Keuangan"

*) Not applying SFAS No. 71 "Financial Instruments"

Manajemen berpendapat bahwa penyisihan estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi yang dibentuk telah memadai.

Based on management's assessment, the amount of estimated losses on commitments and contingencies is adequate.

28. LIABILITAS IMBALAN KERJA DAN LAIN-LAIN

28. EMPLOYEE BENEFITS AND OTHER LIABILITIES

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
<u>Liabilitas imbalan kerja</u>			<u>Employee benefits liabilities</u>
Bonus dan tantiem	730.178	855.623	Bonuses and tantiem
Imbalan kerja jangka panjang (Catatan 40b)	1.279.342	1.073.511	Long term employee benefits (Note 40b)
	2.009.520	1.929.134	
<u>Liabilitas lain-lain</u>			<u>Other liabilities</u>
Dana jaminan pengembang (kewajiban pada pihak ketiga)	511.858	4.680.949	Developers' security deposits (liabilities to third party)
Liabilitas sewa	186.696	167.633	Lease liability
Lainnya	243.774	471.269	Others
	942.328	5.319.851	
Total	2.951.848	7.248.985	Total

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

28. LIABILITAS IMBALAN KERJA DAN LAIN-LAIN
(lanjutan)

Cadangan atas bonus merupakan kewajiban atas jasa produksi karyawan pada tahun berjalan yang belum dibagikan pada akhir tahun.

Dana jaminan pengembang merupakan setoran jaminan dari pengembang untuk menjamin penyelesaian kewajiban pengembang di Bank.

Bank telah mengidentifikasi dugaan pemalsuan bilyet deposito Bank dan dari hasil pemeriksaan Bank menunjukkan bahwa terdapat beberapa bilyet deposito Bank yang diduga dipalsukan oleh pihak lain di luar Bank sehingga tidak tercatat dalam sistem Bank. Bank telah melaporkan kasus tersebut kepada pihak berwajib dan saat ini sedang dalam proses penyidikan sehingga jumlah pasti atas potensi kerugian dari kasus tersebut belum dapat ditentukan. Sebagai bentuk penerapan prinsip kehati-hatian, Bank telah membentuk cadangan atas potensi kerugian operasional masing-masing per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp32.971 dan Rp16.590.

Pengungkapan liabilitas sewa pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

28. EMPLOYEE BENEFITS AND OTHER LIABILITIES
(continued)

Provision for bonus represents unpaid employees' bonus for the current year which has not yet been distributed at the end of the year.

Developer's security deposits represent security deposit from developer to ensure that the developer settle its obligation to the Bank.

The Bank has identified an indication of forged transaction in the Bank's certificate of time deposits and based on the Bank's investigation, there were several Bank's certificate of time deposits forged by third party, therefore it is not recorded in the Bank's system. The Bank has reported this case to the authority and currently it is in the process of investigation, therefore the definite amount of potential loss from this case is still cannot be determined yet. In view of implementation of prudential banking principle, the Bank has provided allowance for potential operational losses as of December 31, 2023 and 2022 amounting to Rp32,971 and Rp16,590, respectively.

Disclosure of lease liabilities on December 31, 2023 and 2022 is as follows:

31 Desember/December 31, 2023						
	1 Januari/ January 1, 2023	Penambahan liabilitas sewa/ Additions of lease liabilities	Beban bunga atas liabilitas sewa/ Interest expense of lease liabilities	Pembayaran liabilitas sewa/ Payment of lease liabilities	31 Desember/ December 31, 2023	
Bangunan	47.274	1.260	1.264	(18.046)	30.488	Building
Kendaraan	118.726	99.737	8.933	(62.426)	156.037	Motor vehicles
Mesin ATM	1.510	39	39	(1.501)	48	ATM machine
Lainnya	123	-	-	-	123	Others
Total	167.633	101.036	10.236	(81.973)	186.696	Total

31 Desember/December 31, 2022						
	1 Januari/ January 1, 2022	Penambahan liabilitas sewa/ Additions of lease liabilities	Beban bunga atas liabilitas sewa/ Interest expense of lease liabilities	Pembayaran liabilitas sewa/ Payment of lease liabilities	31 Desember/ December 31, 2022	
Bangunan	95.663	3.571	3.571	(51.960)	47.274	Building
Kendaraan	25.920	122.449	6.293	(29.643)	118.726	Motor vehicles
Mesin ATM	4.605	247	246	(3.342)	1.510	ATM machine
Lainnya	160	1	1	(38)	123	Others
Total	126.348	126.268	10.111	(84.983)	167.633	Total

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

29. EKUITAS

a. Modal Saham

Rincian modal dasar, modal ditempatkan dan disetor penuh Bank adalah sebagai berikut:

31 Desember/December 31, 2023					
	Jumlah lembar saham/ Number of shares	Nilai nominal per lembar saham (Rupiah penuh)/ Par value per share (Full Rupiah)	Jumlah nilai saham/ Total value of shares	Persentase kepemilikan/ Percentage ownership	
Modal Dasar					Authorized Capital
Saham Seri A Dwiwarna	1	500	-	0.00%	Series A Dwiwarna Stock
Saham Biasa atas nama Seri B	20.478.431.999	500	10.239.216	100.00%	Series B Common Stock
	20.478.432.000		10.239.216	100,00%	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh					Issued and Fully Paid Capital
Saham Seri A Dwiwarna Pemerintah	1	500	-	0.00%	Series A Dwiwarna Stock Government
Saham Seri B Pemerintah	8.420.666.647	500	4.210.333	60,00%	Series B Stock Government
Dewan Komisaris					Board of Commissioners
Herry Trisaputra Zuna	404.600	500	202	0,00%	Herry Trisaputra Zuna
Himawan Arief Sugoto	404.600	500	202	0,00%	Himawan Arief Sugoto
Dewan Direksi					Board of Directors
Nixon L.P Napitupulu	4.250.500	500	2.125	0,03%	Nixon L.P Napitupulu
Oni Febriarto Rahardjo	308.000	500	154	0,01%	Oni Febriarto Rahardjo
Nofry Rony Poetra	2.531.022	500	1.266	0,02%	Nofry Rony Poetra
Elisabeth Novie Riswati	1.733.200	500	867	0,01%	Elisabeth Novie Riswati
Eko Waluyo	1.871.964	500	936	0,01%	Eko Waluyo
Setiyo Wibowo	1.892.700	500	946	0,01%	Setiyo Wibowo
Jasmin	2.848.030	500	1.424	0,02%	Jasmin
Andi Nirwoto	1.822.161	500	911	0,01%	Andi Nirwoto
Hirwandi Gafar	1.763.314	500	882	0,01%	Hirwandi Gafar
Masyarakat (kepemilikan masing-masing dibawah 5% untuk setiap pihak)	5.593.947.674	500	2.796.974	39,86%	Public (ownership less than 5% each)
Total	14.034.444.413		7.017.222	100,00%	Total

29. EQUITY

a. Capital Stock

The details of the Bank's authorized capital stock and issued and fully paid capital stock are as follows:

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

29. EKUITAS (lanjutan)

a. Modal Saham (lanjutan)

Rincian modal dasar, modal ditempatkan dan disetor penuh Bank adalah sebagai berikut (lanjutan):

31 Desember/December 31, 2022					
	Jumlah lembar saham/ Number of shares	Nilai nominal per lembar saham (Rupiah penuh)/ Par value per share (Full Rupiah)	Jumlah nilai saham/ Total value of shares	Persentase kepemilikan/ Percentage ownership	
Modal Dasar					Authorized Capital
Saham Seri A Dwiwarna	1	500	-	0.00%	Series A Dwiwarna Stock
Saham Biasa atas nama Seri B	20.478.431.999	500	10.239.216	100.00%	Series B Common Stock
	20.478.432.000		10.239.216	100,00%	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh					Issued and Fully Paid Capital
Saham Seri A Dwiwarna Pemerintah	1	500	-	0.00%	Series A Dwiwarna Stock Government
Saham Seri B Pemerintah	6.353.999.999	500	3.177.000	60,00%	Series B Stock Government
Dewan Direksi					Board of Directors
Haru Koesmahargyo	304.600	500	152	0,00%	Haru Koesmahargyo
Nixon L.P Napitupulu	2.481.800	500	1.241	0,02%	Nixon L.P Napitupulu
Hirwandi Gafar	603.900	500	302	0,01%	Hirwandi Gafar
Elisabeth Novie Riswati	581.200	500	291	0,01%	Elisabeth Novie Riswati
Andi Nirwoto	648.300	500	324	0,01%	Andi Nirwoto
Eko Waluyo	686.300	500	343	0,01%	Eko Waluyo
Nofry Rony Poetra	1.034.600	500	517	0,01%	Nofry Rony Poetra
Jasmin	1.422.400	500	711	0,01%	Jasmin
Setiyo Wibowo	547.900	500	274	0,00%	Setiyo Wibowo
Masyarakat (kepemilikan masing-masing dibawah 5% untuk setiap pihak)	4.227.689.000	500	2.113.845	39,92%	Public (ownership less than 5% each)
Total	10.590.000.000		5.295.000	100,00%	Total

Saham Seri A Dwiwarna adalah saham yang memberikan hak-hak preferen kepada pemegangnya untuk menyetujui pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris dan Direksi, perubahan anggaran dasar, menyetujui penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan Bank, pengajuan permohonan agar Bank dinyatakan pailit dan pembubaran Bank.

Saham Seri B adalah saham biasa atas nama yang dapat dimiliki oleh masyarakat.

Series A Dwiwarna share is the share that gives the shareholder preferential rights to approve the appointment or dismissal of Commissioners and Directors, changes in Articles of Association, approve on Bank's merger, dissolution, acquisition and separation, submission of request for bankruptcy and liquidation of the Bank.

Series B shares are common shares that can be owned by the public.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

29. EKUITAS (lanjutan)

a. Modal Saham (lanjutan)

Kepemilikan saham oleh Dewan Komisaris dan Direksi adalah dalam rangka Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 45/POJK.03/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum, dimana anggota Direksi dan Dewan Komisaris Non-Independen diberikan remunerasi yang bersifat variabel dalam bentuk saham Perseroan.

Saham yang dimiliki oleh Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar 19.830.091 lembar saham dan 8.311.000 lembar saham atau 0,11% dan 0,08% dari jumlah modal dasar.

b. Tambahan modal disetor

Perubahan tambahan modal disetor adalah sebagai berikut:

Saldo pada tanggal 1 Januari 2009	-
Tambahan Modal disetor akibat penawaran umum perdana tahun 2009	708.017
Biaya emisi penerbitan saham	(68.391)
	639.626
Tambahan Modal disetor akibat adanya pelaksanaan opsi pembelian (eksekusi) saham MESOP I tahap 1 dan 2 Tahun 2011	94.733
	734.359
Tambahan Modal disetor akibat adanya pelaksanaan opsi pembelian (eksekusi) saham MESOP I tahap 3 dan 4 Tahun 2012	5.219
Tambahan Modal disetor akibat adanya pelaksanaan opsi pembelian (eksekusi) saham MESOP II tahap 1 dan 2 Tahun 2012	1.130
	740.708
Tambahan Modal disetor akibat Penawaran Umum Saham Terbatas I pada tahun 2012	1.111.949
Biaya emisi penerbitan saham	(59.154)
	1.793.503

29. EQUITY (continued)

a. Capital Stock (continued)

The shares ownership by board of commissioners and board of directors follows the Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 45/POJK.03/2015 dated December 23, 2015 concerning Implementation of Governance in the Provision of Remuneration for Commercial Banks, where members of the Directors and Board of Commissioners are given variable remuneration in the form of the Company's shares.

Shares held by the Board of Commissioners and Board of Directors for the years ended December 31, 2023 and 2022 amounted to 19,830,091 shares and 8,311,000 shares or 0.11% and 0.08% of the total authorized capital, respectively.

b. Additional Paid In Capital

The movements in additional paid in capital are as follows:

Balance as January 1, 2009
Additional Paid in capital due to Initial Public Offering in 2009
Shares Issuance Cost
Additional Paid in capital due to purchased stock option during phases 1 and 2 of MESOP I in 2011
Additional Paid in capital due to purchased stock option during phases 3 and 4 of MESOP I in 2012
Additional Paid in capital due to purchased stock option during phases 1 and 2 of MESOP II in 2012
Additional paid in capital due to Right Issue I in 2012
Shares Issuance Cost

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

29. EKUITAS (lanjutan)

b. Tambahan modal disetor (lanjutan)

Perubahan tambahan modal disetor adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Tambahan Modal disetor akibat adanya pelaksanaan opsi pembelian (eksekusi) saham MESOP I tahap 5 dan 6 Tahun 2013	11.063
Tambahan Modal disetor akibat adanya pelaksanaan opsi pembelian (eksekusi) saham MESOP II tahap 3 dan 4 Tahun 2013	117.623
Tambahan Modal disetor akibat adanya pelaksanaan opsi pembelian (eksekusi) saham MESOP III tahap 1 dan 2 Tahun 2013	103.575
	<u>2.025.764</u>
Tambahan Modal disetor akibat adanya pelaksanaan opsi pembelian (eksekusi) saham MESOP I tahap 7 dan 8 Tahun 2014	1.840
Tambahan Modal disetor akibat adanya pelaksanaan opsi pembelian (eksekusi) saham MESOP II tahap 5 dan 6 Tahun 2014	243
Tambahan Modal disetor akibat adanya pelaksanaan opsi pembelian (eksekusi) saham MESOP III tahap 3 dan 4 Tahun 2014	289
	<u>2.028.136</u>
Tambahan Modal disetor akibat adanya pelaksanaan opsi pembelian (eksekusi) saham MESOP II tahap 7 dan 8 serta MESOP III tahap 5 dan 6 Tahun 2015	18.462
	<u>2.046.598</u>
Tambahan Modal disetor akibat adanya pelaksanaan opsi pembelian (eksekusi) saham MESOP III tahap 7 Tahun 2016	7.856
	<u>2.054.454</u>
Tambahan Modal disetor akibat Penawaran Umum Saham Terbatas II pada tahun 2022/2023	2.411.111
	<u>(46.665)</u>
Biaya Emisi Penerbitan Saham	<u><u>4.418.900</u></u>

29. EQUITY (continued)

b. Additional paid-in capital (continued)

The movements in additional paid in capital are as follows: (continued)

Additional Paid in capital due to purchased stock option during phases 5 and 6 of MESOP I in 2013
Additional Paid in capital due to purchased stock option during phases 3 and 4 of MESOP II in 2013
Additional Paid in capital due to purchased stock option during phases 1 and 2 of MESOP III in 2013
Additional Paid in capital due to purchased stock option during phases 7 and 8 of MESOP I in 2014
Additional Paid in capital due to purchased stock option during phases 5 and 6 of MESOP II in 2014
Additional Paid in capital due to purchased stock option during phases 3 and 4 of MESOP III in 2014
Additional Paid in capital due to purchased stock option during phases 7 and 8 of MESOP II and phases 5 and 6 of MESOP III in 2015
Additional Paid in capital due to purchased stock option during phase 7 of MESOP III in 2016
Additional paid in capital due to Right Issue II in 2022/2023
Shares Issuance Cost

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

29. EKUITAS (lanjutan)

c. Penggunaan Laba

Penggunaan Laba Tahun 2022

Alokasi penggunaan laba untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Dividen sebesar Rp609.015
- b. Laba ditahan yang telah ditentukan penggunaannya Rp2.436.057

Penggunaan Laba Tahun 2021

Alokasi penggunaan laba untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

- a. Dividen sebesar Rp237.624
- b. Laba ditahan yang telah ditentukan penggunaannya Rp2.138.602

d. Dana Setoran Modal

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tanggal 18 Oktober 2022, Para Pemegang Saham Bank Menyetujui Untuk Melakukan Penambahan Modal Melalui Penawaran Umum Terbatas II (PUT II) Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) kepada para pemegang saham Bank sejumlah 4.600.000.000 (empat miliar enam ratus juta) lembar saham dengan nominal sebesar Rp500 (nilai penuh) (lima ratus rupiah) per lembar saham dengan harga pelaksanaan Rp1.200 (nilai penuh) (seribu dua ratus rupiah) per lembar saham.

Bank melakukan pembukuan Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) Bank BTN Tahun 2022 dengan setoran modal dari pemerintah sebesar Rp2.480.000 dan setoran modal dari publik sebesar Rp276.575.

Berdasarkan kajian legal yang telah dilakukan oleh Bank, dana penambahan modal melalui PMHMETD sudah dapat diakui sebagai modal disetor dikarenakan sudah terdapatnya akta perubahan anggaran dasar Bank pada tanggal 16 Maret 2023.

29. EQUITY (continued)

c. Profit Distribution

Profit Distribution for Year 2022

Allocation of profit distribution for the year ended December 31, 2022, are as follow:

- a. Dividends amounted to Rp609,015
- b. Appropriated retained earnings amounted to Rp2,436,057

Profit Distribution for Year 2021

Allocation of profit distribution for the year ended December 31, 2021 are as follow:

- a. Dividends amounted to Rp237,624
- b. Appropriated retained earnings amounted to Rp2,138,602

d. Capital deposit fund

Based on extraordinary meeting of shareholder dated October 18, 2022, the shareholder of the Bank approved the additional capital through the Limited Public Offering II (PUT II) with pre-emptive rights to the Bank's shareholders at the most 4,600,000,000 (four billion six hundred million) common registered shares with a nominal value of Rp500 (full amount) per share with exercise price of Rp1,200 (full amount) per share.

The bank has recorded additional capital with pre-emptive rights (PMHMETD) for Bank BTN in 2022 with a capital deposit from government of Rp2,480,000 and paid up capital for the public Rp276,575.

Based on legal assessment that conducted by the bank, the additional capital through PMHMETD can already be recognized as paid-up capital due to the deed of amendment to the Bank's articles of association on March 16, 2023.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

30. PENDAPATAN BUNGA DAN BAGI HASIL

- a. Pendapatan Bunga
 Akun ini terdiri dari:

	Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember/ For the year Ended December 31	
	2023	2022
Biaya perolehan diamortisasi		
Kredit yang diberikan	22.387.831	20.955.847
Giro pada Bank Indonesia	480.068	217.757
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	133.613	71.670
Giro pada bank lain	2.568	1.311
Tagihan lainnya	8.210	5.805
Efek dibeli dengan janji dijual kembali	57.873	86.602
Obligasi pemerintah	620.967	453.703
Efek-efek	46.996	56.439
Nilai wajar melalui laba rugi		
Obligasi pemerintah	176.455	236.476
Efek-efek	80.180	82.222
Derivatif	81.505	55.005
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain		
Obligasi pemerintah	423.226	828.759
Efek-efek	223.037	181.604
Total	24.722.529	23.233.200

**30. INTEREST INCOME AND INCOME FROM PROFIT
SHARING**

- a. Interest Income
 This account consists of:

Amortized cost
Loans
Current accounts with Bank Indonesia
Placements with Bank Indonesia and other banks
Current accounts with other banks
Others receivable
Securities purchased under agreement to resell
Government bonds
Securities
Fair value through profit or loss
Government bonds
Securities
Derivative
Fair value through other comprehensive income
Government bonds
Securities
Total

- b. Bagi hasil dan margin unit syariah
 Akun ini terdiri dari:

	Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember/ For the year Ended December 31	
	2023	2022
Pendapatan <i>murabahah</i>	2.242.259	1.657.741
Pendapatan bagi hasil <i>musyarakah</i>	339.310	322.992
Pendapatan <i>istishna</i>	339.895	278.899
Pendapatan bagi hasil <i>mudharabah</i>	11.906	25.771
Pendapatan usaha utama lainnya	625.353	388.765
Total	3.558.723	2.674.168

- b. Profit sharing and margin from sharia unit
 This account consists of:

Income from <i>murabahah</i>
<i>Musyarakah</i> profit sharing income
Income from <i>istishna</i>
<i>Mudharabah</i> profit sharing income
Other main operating income
Total

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

31. BEBAN BUNGA, BAGI HASIL DAN BONUS

a. Beban Bunga

Akun ini terdiri dari:

	Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember/ For the year Ended December 31	
	2023	2022
Deposito berjangka	7.292.773	5.204.910
Giro	2.676.389	1.343.080
Pinjaman yang diterima	1.240.294	1.133.603
Pinjaman subordinasi dan efek-efek subordinasi	593.559	596.092
Surat-surat berharga yang diterbitkan	559.845	880.152
Tabungan	527.326	563.151
Kewajiban derivatif	140.185	102.692
Simpanan dari bank lain	97.192	36.387
Efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	75.545	6.852
Total	13.203.108	9.866.919

b. Bonus Simpanan Wadiah dan Hak Pihak Ketiga
atas Bagi hasil Mudharabah

Bonus simpanan wadiah:

	Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember/ For the year Ended December 31	
	2023	2022
Beban bonus simpanan wadiah:		
Giro wadiah	66.217	52.233
Tabungan wadiah	5.404	5.325
	71.621	57.558

Hak bagi hasil mudharabah:

	Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember/ For the year Ended December 31	
	2023	2022
Hak Pihak Ketiga atas Bagi hasil Mudharabah:		
Deposito mudharabah	1.052.226	601.033
Tabungan mudharabah	201.556	141.241
Pinjaman mudharabah	108.623	65.839
Giro mudharabah	10.299	7.690
Sukuk mudharabah	212	-
Total	1.372.916	815.803

**31. INTEREST, PROFIT SHARING AND BONUS
EXPENSES**

a. Interest Expense

This account consists of:

Time deposits
Demand deposits
Fund borrowings
Subordinated loan
and securities
Securities issued
Savings deposits
Derivative liabilities
Deposits from other banks
Securities sold under
repurchase agreements

b. Wadiah Deposit Bonus and Third Parties' Share
on Return of Mudharabah

Wadiah deposit bonus:

Wadiah bonus expenses:
Wadiah demand deposit
Wadiah saving deposit

Mudharabah share on return:

Third Parties' Share on Return
of Mudharabah:
Mudharabah time deposit
Mudharabah saving deposit
Mudharabah borrowing
Mudharabah demand deposit
Mudharabah sukuk

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

32. PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA - LAIN-LAIN

Akun ini terdiri dari:

	Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember/ For the year Ended December 31	
	2023	2022
Jasa perbankan	216.776	188.557
<i>Servicing Fee</i> Sekuritisasi Aset	95.158	87.369
Jasa penagihan - <i>payment points</i>	14.993	16.955
Lainnya	983.820	529.894
Total	1.310.747	822.775

Jasa perbankan terdiri dari pendapatan dari transaksi transfer dana, pendapatan sewa *safe deposit box* dan pendapatan administrasi layanan ATM.

Lainnya terutama terdiri dari provisi atas garansi bank yang diterbitkan, komisi yang diterima dari perusahaan asuransi atas produk asuransi yang terjual melalui Bank, pembalikan atas cadangan pajak, hukum dan operasional dan pembalikan atas cadangan dana jaminan developer.

33. PENYISIHAN (PEMBALIKAN) KERUGIAN PENURUNAN NILAI ASET KEUANGAN DAN NON- ASET KEUANGAN

Akun ini terdiri dari:

	Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember/ For the year Ended December 31	
	2023	2022
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah (Catatan 11)	3.711.122	4.039.507
Efek-efek (Catatan 8)	30.502	(19.259)
Giro pada bank lain (Catatan 6)	57	49
Tagihan Akseptasi (Catatan 13)	23.740	(487)
Properti Terbengkalai	(24)	(2.432)
Total	3.765.397	4.017.378

32. OTHER OPERATING INCOME - OTHERS

This account consists of:

Bank services
Securitization Assets Servicing Fee
Collection services - payment points
 Others

Total

Bank services pertains to income from fund transfer transactions, *safe deposit box* rentals and ATM service charges.

Others consist mainly of provision from bank guarantee issued, commission received from insurance companies for insurance products sold by the Bank to its borrowers, reversal of tax, law and operational provision and reversal of developer's security deposits reserves.

33. PROVISION FOR (REVERSAL OF) IMPAIRMENT LOSSES ON FINANCIAL AND NON-FINANCIAL ASSETS

This account consists of:

Loans and sharia financing/receivables (Note 11)
Securities (Note 8)
Current accounts with other banks (Note 6)
Acceptance Receivable (Note 13)
 Abandoned Property

Total

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

34. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

Akun ini terdiri dari:

34. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

This account consists of:

	Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember/ For the year Ended December 31		
	2023	2022	
Perbaikan dan pemeliharaan	1.108.838	1.136.954	Repairs and maintenance
Promosi	537.253	469.580	Promotion
Penyusutan (Catatan 14)	489.874	426.546	Depreciation (Note 14)
Sewa bukan PSAK No. 73	357.523	388.480	Lease expense non SFAS No. 73
Listrik, air dan komunikasi	258.934	296.549	Electricity, water and telecommunications
Beban kantor	232.271	229.233	Office expenses
Jasa profesional	229.724	236.277	Professional fees
Beban depresiasi aset hak guna (Catatan 14)	226.851	202.514	Depreciation expense of right of use asset (Note 14)
Transportasi	171.228	135.604	Transportation
Outsourcing	45.173	54.833	Outsourcing
Lainnya	227.110	177.458	Others
Total	3.884.779	3.754.028	Total

Lainnya terutama terdiri dari beban administrasi *branchless banking*, biaya operasional program pemerintah, premi asuransi untuk gedung, premi asuransi kas dalam perjalanan serta kas dalam khazanah dan beban operasional protokoler.

Others consist mainly of *branchless banking* administration expense, government program operational expense, insurance premium on the building, insurance premium on in transit and cash in vault and protokoler operational expenses.

35. GAJI DAN TUNJANGAN KARYAWAN

Akun ini terdiri dari:

35. SALARIES AND EMPLOYEE BENEFITS

This account consists of:

	Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember/ For the year Ended December 31		
	2023	2022	
Gaji dan upah			Salaries and wages
Rutin	2.353.451	2.122.173	Recurring
Tidak rutin	1.495.120	1.954.049	Non-recurring
Pelatihan dan pengembangan	95.931	87.757	Training and development
Lainnya	38.001	26.319	Others
Total	3.982.503	4.190.298	Total

Lainnya terdiri dari beban imbalan kerja, biaya perekrutan, pesangon dan tunjangan rekreasi karyawan.

Others consists mainly of employee benefits expense, recruitment costs, severance costs and employee recreational costs.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

36. BEBAN OPERASIONAL LAINNYA - LAIN-LAIN

Akun ini terdiri dari:

	Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember/ For the year Ended December 31	
	2023	2022
Imbalan atas jasa penagihan	63.279	71.635
Kerugian atas penyelesaian kredit bermasalah	40.987	51.106
Lainnya	383.348	206.567
Total	487.614	329.308

Lainnya terutama terdiri dari beban representasi, jamuan makan dan minum rapat dan beban terkait dengan cadangan atas risiko operasional lainnya.

36. OTHER OPERATING EXPENSES - OTHERS

This account consists of:

Fees for collection services
Loss on bad debt settlement
Others
Total

Others consist mainly of representation, entertainment expense and expense related to the provision for other operational risk.

37. PENDAPATAN (BEBAN) BUKAN OPERASIONAL - NETO

Akun ini terdiri dari:

	Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember/ For the year Ended December 31	
	2023	2022
Pendapatan sewa gedung	140	200
Pendapatan (beban) lainnya - neto	(159.659)	60.687
Total	(159.519)	60.887

Lainnya terutama terdiri dari keuntungan/(kerugian) revaluasi kurs, beban denda administrasi, keuntungan/(kerugian) jual beli mata uang asing dan beban bina lingkungan.

37. NON-OPERATING INCOME (EXPENSES) - NET

This account consists of:

Building rental income equipment
Other income (expense) - net
Total

Others mainly consist of gains/(losses) on exchange rate revaluation, administrative penalty expenses, gains/(losses) on buying and selling foreign currencies and environmental development expenses.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

38. PERPAJAKAN

- a. Rekonsiliasi antara laba sebelum beban pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan taksiran penghasilan kena pajak, adalah sebagai berikut:

38. TAXATION

- a. The reconciliation between income before tax expense, as shown in the statement of profit or loss and other comprehensive income are as follows:

Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember/ For the year Ended December 31			
	2023	2022	
Laba sebelum beban pajak	4.380.210	3.875.690	Income before tax expense
Beda temporer:			Temporary differences:
Penyisihan untuk imbalan kerja	19.804	274.687	Provision for employee benefits
Penurunan (kenaikan) nilai efek-efek yang dimiliki untuk diperdagangkan	59.053	(206.021)	Decrease (increase) in fair value of trading securities
Penyusutan aset hak guna Pembentukan	5.637	(3.753)	Depreciation of Right of Use Asset
cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan dan non-aset keuangan dan lainnya	(153.722)	928.143	Provision for allowance for impairment losses on financial assets and non-financial assets and others
Selisih nilai wajar efek-efek	803.279	-	Difference in the fair value of securities
	734.051	993.056	
Beda tetap:			Permanent differences:
Dana sosial dan representasi	10.231	113.258	Social funds and representation
Beban kantor	72.557	84.703	Office expense
Kenikmatan karyawan	65.214	136.692	Employee welfare
Sumbangan	79.996	62.204	Donations
Sewa	10.997	14.401	Rent
Perbaikan dan pemeliharaan	4.993	6.061	Repairs and maintenance
Penyusutan atas aset tetap yang tidak dapat disusutkan menurut pajak	2.407	3.031	Depreciation of premises and equipment which are non-depreciable for tax purposes
Pendapatan sewa tarif final	(128)	(200)	Rent income subject to final tax
Perubahan nilai EBA yang tidak dapat diakui secara pajak	(28)	60.514	Changes in EBA fair value which are non-recognizable for tax purposes
Lain-lain	1.036	15.316	Others
	247.275	495.980	
Taksiran penghasilan kena pajak	5.361.536	5.364.726	Estimated taxable income
Beban pajak penghasilan	1.018.692	1.019.298	Income tax expense
Pajak penghasilan Pasal 25	(673.178)	(671.524)	Income tax - Article 25
Hutang pajak penghasilan badan (Catatan 17)	345.514	347.774	Corporate income tax payable (Note 17)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

38. PERPAJAKAN (lanjutan)

- a. Rekonsiliasi antara laba sebelum beban pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan taksiran penghasilan kena pajak, adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Berdasarkan Undang-undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia, Bank menghitung, menetapkan dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang. Direktur Jendral Pajak ("DJP") dapat menetapkan atau mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak. Laba kena pajak hasil rekonsiliasi tahun 2023 dan 2022 menjadi dasar dalam pengisian SPT Tahunan PPh Badan yang disampaikan kepada otoritas perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- b. Beban/(manfaat) pajak

	Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember/ For the year Ended December 31	
	2023	2022
Beban pajak - kini	1.018.692	1.019.298
Beban/(manfaat) pajak - tangguhan	(139.470)	(188.681)
Total	879.222	830.617

- c. Aset (Liabilitas) Pajak Tangguhan

Pengaruh pajak atas perbedaan temporer yang signifikan antara pelaporan keuangan dan pajak adalah sebagai berikut:

	31 Desember/December 31, 2023				
	Saldo awal/ Beginning balance	Dikreditkan/ (dibebankan) ke laporan laba rugi/ Credited/(charged) to statement of profit or loss and other income	Dibebankan ke ekuitas/ Charged to equity	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Cadangan kerugian penurunan nilai kredit yang diberikan	2.358.305	(29.693)	-	2.328.612	Allowance for impairment losses loans
Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan - selain kredit yang diberikan	11.580	9.723	-	21.303	Allowance for impairment losses on financial assets - other than loans
Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan	383	-	-	383	Allowance for impairment losses on non non-financial assets
Cadangan hukum, kecurangan (fraud) dan lainnya	33.591	(9.237)	-	24.354	Allowance for legal, fraud and others
Cadangan imbalan kerja	203.967	3.763	35.345	243.075	Allowance for employee benefits
Penyusutan aset hak guna (Laba) rugi yang belum direalisasi atas efek yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	19.702	1.071	-	20.773	Depreciation of right of use asset
Rugi yang belum direalisasi atas lindung nilai arus kas (Laba) rugi yang belum direalisasi atas efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif	(10.460)	11.220	-	760	Unrealized (gain) loss on fair value through profit or loss
	11.565	-	(3.977)	7.588	Unrealized loss on cash flow hedges
	292.088	-	(93.277)	198.811	Unrealized (gain) loss on fair value through other comprehensive income
Selisih nilai wajar efek-efek Lainnya	(5.293)	152.623	-	152.623	Differences in fair value of securities
		-	5.293	-	Others
Aset pajak tangguhan - neto	2.915.428	139.470	(56.616)	2.998.282	Deferred tax assets - net

38. TAXATION (continued)

- a. The reconciliation between income before tax expense, as shown in the statement of profit or loss and other comprehensive income are as follows: (continued)

Under the prevailing Taxation Laws of Indonesia, the Bank calculates, determines and pays tax payable based on self-assessment. The Directorate General of Taxes ("DGT") may assess or amend taxes within 5 (five) years from the time the tax becomes due. The taxable profit resulting from the reconciliation in 2023 and 2022 is the basis for filling out the Annual Corporate Income Tax Return which is submitted to the tax authorities in accordance with applicable regulations.

- b. Tax Expense/(benefit)

Current tax expense
Deferred tax expense/(benefit)

- c. Deferred tax assets (liabilities)

The tax effects on significant outstanding temporary differences between financial and tax reporting purposes are as follows:

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

38. PERPAJAKAN (lanjutan)

38. TAXATION (continued)

c. Aset (Liabilitas) Pajak Tangguhan (lanjutan)

c. Deferred tax assets (liabilities) (continued)

Pengaruh pajak atas perbedaan temporer yang signifikan antara pelaporan keuangan dan pajak adalah sebagai berikut (lanjutan):

The tax effects on significant outstanding temporary differences between financial and tax reporting purposes are as follows (continued):

31 Desember/December 31, 2022

	Saldo awal/ Beginning balance	Dikreditkan/ (dibebankan) ke laporan laba rugi/ Credited/(charged) to statement of profit or loss and other income	Dibebankan ke ekuitas/ Charged to equity	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Cadangan kerugian penurunan nilai kredit yang diberikan	2.116.831	241.474	-	2.358.305	Allowance for impairment losses loans
Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan - selain kredit yang diberikan	15.120	(3.540)	-	11.580	Allowance for impairment losses on financial assets - other than loans
Cadangan kerugian penurunan nilai aset non keuangan	845	(462)	-	383	Allowance for impairment losses on non non-financial assets
Cadangan hukum, kecurangan (fraud) dan lainnya	94.716	(61.125)	-	33.591	Allowance for legal, fraud and others
Cadangan imbalan kerja	163.152	52.191	(11.376)	203.967	Allowance for employee benefits
Penyusutan aset hak guna (Laba) rugi yang belum direalisasi atas efek yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	20.415	(713)	-	19.702	Depreciation of right of use asset
Rugi yang belum direalisasi atas lindung nilai arus kas (Laba) rugi yang belum direalisasi atas efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif	28.684	(39.144)	-	(10.460)	Unrealized (gain) loss on fair value through profit or loss
	-	-	11.565	11.565	Unrealized loss on cash flow hedges
	(9.103)	-	295.898	286.795	Unrealized (gain) loss on fair value through other comprehensive income
Aset pajak tangguhan - neto	2.430.660	188.681	296.087	2.915.428	Deferred tax assets - net

d. Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku dari laba sebelum beban pajak dan beban pajak penghasilan seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk periode yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

d. The reconciliation between the tax expense computed by applying the applicable tax rate on the income before tax expense and the tax expense shown in the statement of profit or loss and other comprehensive income for the period ended December 31, 2023 and 2022, are as follows:

	Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember/ For the year Ended December 31		
	2023	2022	
Laba sebelum beban pajak	4.380.210	3.875.690	Income before tax expense
Beban pajak dengan tarif pajak yang berlaku	(832.240)	(736.381)	Tax expense at the applicable tax rate
Beda tetap	(46.982)	(94.236)	Permanent differences
Beban pajak	(879.222)	(830.617)	Tax expense

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

38. PERPAJAKAN (lanjutan)

e. Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Badan

Pada tanggal 31 Maret 2020, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Republik Indonesia No. 1 Tahun 2020 yang telah menjadi Undang-Undang (UU) No. 2 Tahun 2020, serta menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 30 Tahun 2020 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka dan berlaku sejak tanggal 19 Juni 2020. Aturan tersebut menetapkan penurunan tarif pajak penghasilan wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap dari semula 25% menjadi 22% untuk tahun pajak 2021 dan 2022 dan 20% mulai tahun pajak 2022 dan seterusnya, serta pengurangan lebih lanjut tarif pajak sebesar 3% untuk wajib pajak dalam negeri yang memenuhi persyaratan tertentu.

Berdasarkan Undang-Undang No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang berlaku 1 Januari 2022 maka tarif pajak kembali ke tarif pajak tunggal yaitu 22%.

Berdasarkan surat keterangan No. DE//2024-0035 tanggal 3 Januari 2024 dan laporan bulanan kepemilikan saham dari Biro Administrasi Efek, Datindo Entrycom atas kepemilikan saham Bank selama periode 2023 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 semua kriteria di atas untuk memperoleh fasilitas penurunan tarif pajak tersebut atas laporan keuangan Bank untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 telah terpenuhi.

Berdasarkan surat keterangan No. DE//2023-0038 tanggal 3 Januari 2023 dan laporan bulanan kepemilikan saham (Formulir No. X.H.I-2 tanggal 3 Januari 2023 dari Biro Administrasi Efek, Datindo Entrycom atas kepemilikan saham Bank selama periode 2022 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022) semua kriteria di atas untuk memperoleh fasilitas penurunan tarif pajak tersebut atas laporan keuangan Bank untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 telah terpenuhi.

Pajak penghasilan badan Bank untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 telah dihitung dengan menggunakan tarif pajak 19%.

38. TAXATION (continued)

e. Reduction of the Tax Rate of Corporate Income Tax

On 31 March 2020, the Government issue Government Regulation in Lieu of Law (Perpu) of the Republic of Indonesia No. 1 of 2020 which has become Law (UU) No. 2 of 2020, as well as stipulated Government Regulation (PP) No. 30 of 2020 concerning Tariff Reduction for Domestic Public Companies Taxpayers and effective since 19 June 2020. The regulation has stipulated the reduction in the income tax rates for domestic corporate taxpayers and business establishments from 25% to 22% for Fiscal Year 2021 and 2022 and 20% for the Fiscal Year 2022 onwards, and a further reduction of the tax rate by 3% for domestic taxpayers who meet certain requirements.

Based Law No. 7 of 2021 regarding Harmonisation of the Tax Regulation witch applies on January 1, 2022 therefore the tax rate is a single rate of 22%.

Based on Letter No. DE//2024-0035 dated January 3, 2024 and the monthly report of shares ownerships form the Securities Administration Agency (Biro Administrasi Efek), Datindo Entrycom on the ownership of Bank's shares during the period ended December 31, 2023, all of the above mentioned required criteria to obtain the tax rate reduction on Bank's financial statements for the year then ended December 31, 2023 were fulfilled by the Bank.

Based on Letter No. DE//2023-0038 dated January 3, 2023 and the monthly report of shares ownerships (form No. X.H.I-2 dated January 3, 2023 from the Securities Administration Agency (Biro Administrasi Efek), Datindo Entrycom on the ownership of Bank's shares during the period ended December 31, 2022), all of the above mentioned required criteria to obtain the tax rate reduction on Bank's financial statements for the year ended December 31, 2022 were fulfilled by the Bank.

Bank's corporate income tax for the year ended December 31, 2023 and 2022 are calculated using the tax rate of 19%.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

38. PERPAJAKAN (lanjutan)

- e. Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Badan (lanjutan)

Pemeriksaan tahun pajak 2012

Pada tanggal 30 September 2014, Bank telah menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Pajak (SPHP) No. PHP-201/WPJ.02/KP.10/2014 mengenai kekurangan pembayaran pajak PPh Pasal 4 ayat (2) untuk tahun pajak 2012 atas Kantor Cabang Pekanbaru. Atas SPHP tersebut, pada tanggal 10 November 2014, Bank telah menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dengan rincian sebagai berikut:

	Pokok/ Principal (Rp)	Denda/ Penalty (Rp)
Tahun 2012		
SKPKB PPh Pasal 4 ayat 2 No.00095/240/12/218/14	191	92
SKPKB PPh Pasal 4 ayat 2 No.00096/240/12/218/14	191	92
SKPKB PPh Pasal 4 ayat 2 No.00097/240/12/218/14	190	91
SKPKB PPh Pasal 4 ayat 2 No.00098/240/12/218/14	168	81
SKPKB PPh Pasal 4 ayat 2 No.00099/240/12/218/14	214	103
SKPKB PPh Pasal 4 ayat 2 No.00100/240/12/218/14	196	94
SKPKB PPh Pasal 4 ayat 2 No.00101/240/12/218/14	207	99
SKPKB PPh Pasal 4 ayat 2 No.00102/240/12/218/14	245	118
SKPKB PPh Pasal 4 ayat 2 No.00103/240/12/218/14	238	114
SKPKB PPh Pasal 4 ayat 2 No.00104/240/12/218/14	229	110
SKPKB PPh Pasal 4 ayat 2 No.00105/240/12/218/14	250	120
SKPKB PPh Pasal 4 ayat 2 No.00106/240/12/218/14	305	146
Total	2.624	1.260

Pada tanggal 8 Desember 2014, Bank telah melakukan pembayaran atas seluruh tagihan dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) tersebut yaitu sebesar Rp3.884. Pembayaran tersebut dicatat oleh Bank pada aset lain-lain (Catatan 16).

Pada tanggal 20 Januari 2015, Bank mengajukan surat keberatan atas seluruh SKPKB tersebut di atas. Pada tanggal 14 Januari 2016, Kantor Pajak telah menerbitkan Surat Keputusan Keberatan yang menolak seluruh permohonan keberatan Bank. Pada tanggal 2 April 2016 Bank mengajukan permohonan banding atas Surat Keputusan Keberatan tersebut ke Pengadilan Pajak. Pada tanggal 19 Oktober 2017 Pengadilan Pajak telah menerbitkan surat keputusan yang memenangkan Wajib Pajak dan memerintahkan kantor pajak untuk membayar kembali uang muka pajak tersebut.

38. TAXATION (continued)

- e. Reduction of the Tax Rate of Corporate Income Tax (continued)

Assessment for fiscal year 2012

On September 30, 2014, the Bank received Notification of Tax Audit Findings (SPHP) No. PHP-201/WPJ.02/KP.10/2014 regarding tax underpayment for Income Tax Article 4 (2) on the Pekanbaru branch office for fiscal year 2012. Based on Notification of Tax Audit Findings, the Bank has received issued Tax Assessment Letter of Tax Underpayment (SKPKB) on November 10, 2014 as follows:

	Year 2012
SKPKB Article 4 (2) No.00095/240/12/218/14	SKPKB Article 4 (2) No.00095/240/12/218/14
SKPKB Article 4 (2) No.00096/240/12/218/14	SKPKB Article 4 (2) No.00096/240/12/218/14
SKPKB Article 4 (2) No.00097/240/12/218/14	SKPKB Article 4 (2) No.00097/240/12/218/14
SKPKB Article 4 (2) No.00098/240/12/218/14	SKPKB Article 4 (2) No.00098/240/12/218/14
SKPKB Article 4 (2) No.00099/240/12/218/14	SKPKB Article 4 (2) No.00099/240/12/218/14
SKPKB Article 4 (2) No.00100/240/12/218/14	SKPKB Article 4 (2) No.00100/240/12/218/14
SKPKB Article 4 (2) No.00101/240/12/218/14	SKPKB Article 4 (2) No.00101/240/12/218/14
SKPKB Article 4 (2) No.00102/240/12/218/14	SKPKB Article 4 (2) No.00102/240/12/218/14
SKPKB Article 4 (2) No.00103/240/12/218/14	SKPKB Article 4 (2) No.00103/240/12/218/14
SKPKB Article 4 (2) No.00104/240/12/218/14	SKPKB Article 4 (2) No.00104/240/12/218/14
SKPKB Article 4 (2) No.00105/240/12/218/14	SKPKB Article 4 (2) No.00105/240/12/218/14
SKPKB Article 4 (2) No.00106/240/12/218/14	SKPKB Article 4 (2) No.00106/240/12/218/14
Total	Total

On December 8, 2014, the Bank has paid the entire amount in the Tax Assessment Letter of Tax Underpayment (SKPKB) amounting to Rp3,884. The payment is recorded as other assets (Note 16).

On January 20, 2015, the Bank filed letters of tax objection on all of the aforementioned underpayment Tax Assessment Letter. On January 14, 2016, the Tax Office has issued Objection Decision Letters which has rejected all of the Bank's objections. On April 2, 2016, the Bank filed the appeal letters to the Tax Court on all of the aforementioned objection decision letters. On October 19, 2017, Tax Court has issued an appeal decision in favour of the Bank's Tax Appeal and order tax office to refund the prepaid tax.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

38. PERPAJAKAN (lanjutan)

- e. Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Badan (lanjutan)

Pemeriksaan tahun pajak 2012 (lanjutan)

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Pajak (SPHP) No. SPHP-03/PJ.0401/2017 tanggal 22 Mei 2017 mengenai hasil pemeriksaan pajak untuk tahun 2012, Bank telah menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPh Badan Tahun 2012 sebesar Rp59.307 dengan rincian sebagai berikut:

	Pokok/ Principal (Rp)
Tahun 2012	
SKPKB PPh Badan No.00003/206/12/093/17	40.073

Selain itu, Bank juga telah menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPh Pasal 21, 23, 4 ayat (2) dan PPN sebesar Rp4.834 (termasuk penalti). Seluruh SKPKB tersebut termasuk SKPKB PPh Badan telah dibayar pada tanggal 21 Agustus 2017.

Namun demikian Bank tidak setuju dengan SKPKB PPh Badan sebesar Rp48.683 dan mengajukan Surat Keberatan kepada Direktorat Jenderal Pajak tanggal 10 Oktober 2017 yang diterima oleh DJP pada tanggal 12 Oktober 2017. Pembayaran tersebut dicatat oleh Bank pada aset lain-lain.

Kantor Pajak telah menerbitkan Surat Keputusan Keberatan yang menolak permohonan Bank pada tanggal 25 September 2018. Kemudian Bank mengajukan Surat Permohonan Banding ke Pengadilan Pajak pada tanggal 14 Desember 2018. Pada tanggal 15 September 2021 Pengadilan Pajak telah menerbitkan Putusan Banding yang menerima seluruh permohonan banding Bank melalui Putusan Banding No. PUT-010930.15/2018/PP/MXVIII B Tahun 2021.

Pada tanggal 7 Januari 2022, Kantor Pajak telah mengembalikan kelebihan pembayaran pajak atas PPh Badan sebesar Rp48.683 untuk tahun pajak 2012 sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00072.PPH/WPJ.19/KP.04/2021 pada tanggal 14 Oktober 2021.

38. TAXATION (continued)

- e. Reduction of the Tax Rate of Corporate Income Tax (continued)

Assessment for fiscal year 2012 (continued)

Based on Notification of Tax Audit Findings (SPHP) No. SPHP-03/PJ.0401/2017 dated May 22, 2017, regarding tax audit result for the year of 2012, the Bank has received issued Tax Assessment Letter of Tax Underpayment (SKPKB) of Corporate Income Tax for the year of 2012 amounting to Rp59,307 as follows:

	Denda/ Penalty (Rp)		Year 2012
			SKPKB Article Corporate Income Tax No.00003/206/12/093/17
	19.234		

Other than that, the Bank has also received the Tax Assessment Letters of Tax Underpayment (SKPKB) of Article 21, 23, 4 paragraph (2) Income Tax and VAT amounting to Rp4,834 (including penalties). The entire SKPKB including for the Corporate Income Tax has been paid on August 21, 2017.

However, the Bank does not agree with the SKPKB of the Corporate Income Tax amounting to Rp48,683 and has submitted the objection letter dated October 10, 2017 which has been received by the Tax Office on October 12, 2017. This payment is recorded as other assets.

The Tax Office has issued an Objection Decision Letter, which has rejected all of the Bank's objection request, on September 25, 2018. Therefore, the Bank has filed an appeal letter dated December 14, 2018 to the Tax Court and the Tax Court has issued a decision which has granted all Banks' appeal through an Appeal Decision No. PUT-010930.15/2018 PP/MXVIII B Tahun 2021 on September 15, 2021.

On January 7, 2022, the Tax Office has returned the overpayment of tax on Corporate Income Tax amounting to Rp48,683 for fiscal years 2012 in accordance with the Decree of the Director General of Taxes Number KEP-00072.PPH/WPJ.19/KP.04/ 2021 on October 14, 2021.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

38. PERPAJAKAN (lanjutan)

e. Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Badan (lanjutan)

Pemeriksaan tahun pajak 2013

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Pajak (SPHP) No. SPHP-294/WPJ.10/KP.1005/RIK.SIS/2016 tanggal 21 September 2016 mengenai hasil pemeriksaan terhadap Kantor Cabang Semarang untuk tahun 2013, Bank telah menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dengan rincian sebagai berikut:

	Pokok/ Principal (Rp)	Denda/ Penalty (Rp)
Tahun 2013		
SKPKB PPh Pasal 21 No.00001/243/13/511/16	64	30
SKPKB PPh Pasal 23 No.00060/203/13/511/16	0,2	0,1
Total	64,2	30,1
SKPKB PPh Pasal 4 ayat 2 No.00012/240/13/511/16	381	183
SKPKB PPh Pasal 4 ayat 2 No.00013/240/13/511/16	381	183
SKPKB PPh Pasal 4 ayat 2 No.00014/240/13/511/16	381	183
SKPKB PPh Pasal 4 ayat 2 No.00015/240/13/511/16	381	183
SKPKB PPh Pasal 4 ayat 2 No.00016/240/13/511/16	381	183
SKPKB PPh Pasal 4 ayat 2 No.00017/240/13/511/16	381	183
SKPKB PPh Pasal 4 ayat 2 No.00018/240/13/511/16	381	183
SKPKB PPh Pasal 4 ayat 2 No.00019/240/13/511/16	381	183
SKPKB PPh Pasal 4 ayat 2 No.00020/240/13/511/16	381	183
SKPKB PPh Pasal 4 ayat 2 No.00021/240/13/511/16	381	183
SKPKB PPh Pasal 4 ayat 2 No.00022/240/13/511/16	381	183
SKPKB PPh Pasal 4 ayat 2 No.00023/240/13/511/16	381	183
Total	4.572	2.196

Pada tanggal 17 November 2016, Bank telah melakukan pembayaran atas seluruh tagihan dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB). Pembayaran atas SKPKB PPh Pasal 21 dan Pasal 23 yaitu sebesar Rp94 telah dicatat sebagai biaya pajak di tahun 2016 karena bank setuju atas SKPKB tersebut. Sedangkan pembayaran atas SKPKB PPh Pasal 4 ayat (2) yaitu sebesar Rp6.768 dicatat sebagai uang muka pajak (Catatan 16) karena Bank tidak setuju dengan SKPKB tersebut. Pada tanggal 6 Januari 2017, Bank mengajukan surat keberatan atas SKPKB PPh Pasal 4 ayat (2) tersebut di atas.

38. TAXATION (continued)

e. Reduction of the Tax Rate of Corporate Income Tax (continued)

Assessment for fiscal year 2013

Based on Notification of Tax Audit Findings (SPHP) No.SPHP-294/WPJ.10/KP.1005/RIK.SIS/2016 dated September 21, 2016, regarding tax audit result on the Semarang Branch Office for the year of 2013, Bank has received Tax Assessment Letter of Tax Underpayment (SKPKB) as follows:

	Year 2013
SKPKB Article 21 No.00001/243/13/511/16	
SKPKB Article 23 No.00060/203/13/511/16	
Total	
SKPKB Article 4 (2) No.00012/240/13/511/16	
SKPKB Article 4 (2) No.00013/240/13/511/16	
SKPKB Article 4 (2) No.00014/240/13/511/16	
SKPKB Article 4 (2) No.00015/240/13/511/16	
SKPKB Article 4 (2) No.00016/240/13/511/16	
SKPKB Article 4 (2) No.00017/240/13/511/16	
SKPKB Article 4 (2) No.00018/240/13/511/16	
SKPKB Article 4 (2) No.00019/240/13/511/16	
SKPKB Article 4 (2) No.00020/240/13/511/16	
SKPKB Article 4 (2) No.00021/240/13/511/16	
SKPKB Article 4 (2) No.00022/240/13/511/16	
SKPKB Article 4 (2) No.00023/240/13/511/16	
Total	

On November 17, 2016, the Bank has paid the entire amount in the Tax Assessment Letters (TAL) of Tax Underpayment (SKPKB). The payment of the TAL of Article 21 and Article 23 amounted to Rp94 has been charged as tax expenses in 2016 since the Bank has agreed with the said SKPKB. However, in regard to the payment of the SKPKB of Article 4 paragraph (2) amounting to Rp6,768 has been recognized as prepaid tax (Note 16) since Bank did not agree with the SKPKB. On January 6, 2017, the Bank filed letters of tax objection on the aforementioned TAL of Article 4 paragraph (2).

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

38. PERPAJAKAN (lanjutan)

- e. Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Badan (lanjutan)

Pemeriksaan tahun pajak 2013 (lanjutan)

Pada tanggal 16 Oktober 2017, Kantor Pajak telah menerbitkan Surat Keputusan Keberatan yang menerima sebagian dari permohonan Bank. Berdasarkan Keputusan Keberatan tersebut, Kantor Pajak telah mengembalikan kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp57 yang telah dicatat sebagai pengurang uang muka pajak. Atas pajak yang masih belum diterima, kemudian Bank mengajukan Surat Permohonan Banding ke Pengadilan Pajak pada tanggal 12 Januari 2018.

Pada tanggal 2 Mei 2019, Pengadilan pajak telah menerbitkan Putusan Pengadilan Pajak yang memenangkan sebagian dari Banding oleh Bank. Pengembalian pajak tersebut telah diterima pada tanggal 20 Juni 2019 dan 28 Oktober 2019.

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Pajak (SPHP) No. SPHP-00011/WPJ.19/KP.040/RIKSIS/2017 tanggal 19 Juli 2017 mengenai hasil pemeriksaan pajak untuk tahun 2013, Bank telah menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPh Badan Tahun 2013 sebesar Rp183.958 dengan rincian sebagai berikut:

	Pokok/ Principal (Rp)
Tahun 2013	
SKPKB PPh Badan No.00006/206/13/093/17	124.296

Selain itu, Bank juga telah menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPh Pasal 21, 4 ayat (2) dan PPN sebesar Rp9.945 (termasuk penalti). Seluruh SKPKB tersebut termasuk SKPKB PPh Badan telah dibayar pada tanggal 4 September 2017.

Namun demikian Bank tidak sepenuhnya setuju dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPh Badan sebesar Rp156.774 dan mengajukan Surat Keberatan kepada Direktorat Jenderal Pajak melalui surat tanggal 26 Oktober 2017. Pembayaran tersebut dicatat oleh Bank pada aset lain-lain.

Pada tanggal 7 Januari 2022, Kantor Pajak telah mengembalikan kelebihan pembayaran pajak atas PPh Badan sebesar Rp156.774 juta untuk tahun pajak 2013 sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00071.PPH/WPJ.19/KP.04/2021 tanggal 13 Oktober 2021 kepada Bank.

38. TAXATION (continued)

- e. Reduction of the Tax Rate of Corporate Income Tax (continued)

Assessment for fiscal year 2013 (continued)

On October 16, 2017, the Tax Office has issued an Objection Decision Letter, which has partially granted the Bank's objection request. Based on the said Objection Decision Letter the Tax Office has paid the tax overpayment amounting to Rp57 which was booked as a deduction to the prepaid taxes. Therefore, the Bank has filed an appeal letter dated January 12, 2018 to the Tax Court for the remaining ungranted amounts.

On May 2, 2019 The Tax Court has issued a decision letter which has partially granted the Bank's appeal. The refund has been received on June 20, 2019 and October 28, 2019.

Based on Notification of Tax Audit Findings (SPHP) No. SPHP00011/WPJ.19/KP.040/RIKSIS/2017 dated July 19, 2017, regarding tax audit result for the year of 2013, the Bank has received issued Tax Assessment Letter of Tax Underpayment (SKPKB) of Corporate Income Tax for the year of 2013 amounting to Rp183,958 as follows:

	Denda/ Penalty (Rp)		Year 2013
			SKPKB Article Corporate Income Tax No.00006/206/13/093/17
	59.662		

Other than that, the Bank has also received the Tax Assessment Letters of Tax Underpayment (SKPKB) of Article 21, 4 paragraph (2) Income Tax and VAT amounting to Rp9,945 (including penalties). The entire SKPKB including for the Corporate Income Tax has been paid on September 4, 2017.

However, the Bank did not fully agree with the SKPKB of the Corporate Income Tax amounting to Rp156,774 and has submitted the objection letter dated October 26, 2017. The payment is recorded as other assets.

On January 7, 2022, the Tax Office has returned the overpayment of tax on Corporate Income Tax amounting to Rp156.774 for fiscal years 2013 in accordance with the Decree of the Director General of Taxes Number KEP-00071.PPH/WPJ.19/KP.04/2021 dated October 13, 2021.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

38. PERPAJAKAN (lanjutan)

- e. Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Badan (lanjutan)

Pemeriksaan tahun pajak 2013 (lanjutan)

Kantor Pajak telah menerbitkan Surat Keputusan Keberatan yang menolak permohonan Bank pada tanggal 18 September 2018. Kemudian Bank mengajukan Surat Permohonan Banding ke Pengadilan Pajak pada tanggal 14 Desember 2018. Pada tanggal 15 September 2021 Pengadilan Pajak telah menerbitkan Putusan Banding yang menerima seluruh permohonan banding Bank melalui Putusan Banding PUT-010931.15/2018/PP/MXVIII B Tahun 2021.

Pemeriksaan tahun pajak 2014

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Pajak (SPHP) No. SPHP-00016/WPJ.19/KP.04/2017 tanggal 5 Desember 2017 mengenai hasil pemeriksaan pajak untuk tahun 2014, Bank telah menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPh Badan Tahun 2014 sebesar Rp206.337 dengan rincian sebagai berikut:

	Pokok/ Principal (Rp)
Tahun 2014	
SKPKB PPh Badan No.00008/206/14/093/17	139.417

Selain itu, Bank juga telah menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPh Pasal 21, 23, 4 ayat (2) dan PPN sebesar Rp13.530 (termasuk penalti). Seluruh SKPKB tersebut termasuk SKPKB PPh Badan telah dibayar pada tanggal 28 Desember 2017.

Namun demikian Bank tidak sepenuhnya setuju dengan SKPKB PPh Badan sebesar Rp196.971 dan akan mengajukan Surat Keberatan kepada Direktorat Jenderal Pajak pada tanggal 9 Maret 2018.

Kantor Pajak telah menerbitkan Surat Keputusan Keberatan yang menolak permohonan Bank pada tanggal 2 November 2018. Kemudian Bank mengajukan Surat Permohonan Banding ke Pengadilan Pajak pada tanggal 31 Januari 2019. Pada tanggal 15 September 2021 Pengadilan Pajak telah menerbitkan Putusan Banding yang menerima seluruh permohonan banding Bank melalui Putusan Banding PUT-000840.15/2019/PP/M.XVIII B Tahun 2021.

38. TAXATION (continued)

- e. Reduction of the Tax Rate of Corporate Income Tax (continued)

Assessment for fiscal year 2013 (continued)

The Tax Office has issued an Objection Decision Letter, which has rejected the Bank's objection request, on September 18, 2018. Therefore, the Bank has filed an appeal letter dated December 14, 2018 to the Tax Court. The Tax Court has issued a decision which has granted all Banks' appeal through an Appeal Decision No. PUT010931.15/2018/PP/MXVIII B Tahun 2021 on September 15, 2021.

Assessment for fiscal year 2014

Based on Notification of Tax Audit Findings (SPHP) No. SPHP-00016/WPJ.19/KP.04/2017 dated December 5, 2017, regarding tax audit result for the year of 2014, the Bank has received issued Tax Assessment Letter of Tax Underpayment (SKPKB) of Corporate Income Tax amounting to Rp206,337 for the year of 2014 as follows:

	Denda/ Penalty (Rp)		Year 2014
		SKPKB Article Corporate Income Tax No.00008/206/14/093/17	
	66.920		

Other than that, the Bank has also received the Tax Assessment Letters of Tax Underpayment (SKPKB) of Article 21, 23, 4 paragraph (2) Income Tax and VAT amounting to Rp13,530 (including penalties). The entire SKPKB including for the Corporate Income Tax has been paid on December 28, 2017.

However, the Bank did not fully agree with the SKPKB of Corporate Income Tax amounting to Rp196,971 and submitted the objection letter to the Tax Office dated March 9, 2018.

The Tax Office has issued an Objection Decision Letter, which has rejected the Bank's objection request, on November 2, 2018. Therefore, the Bank has filed an appeal letter dated January 31, 2019 to the Tax Court. The Tax Court has issued a decision which has granted all Banks' appeal through an Appeal Decision No. PUT-000840.15/2019/PP/M.XVIII B Tahun 2021 on September 15, 2021.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

38. PERPAJAKAN (lanjutan)

- e. Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Badan (lanjutan)

Pemeriksaan tahun pajak 2014

Pada tanggal 11 Maret 2022, Kantor Pajak telah mengembalikan kelebihan pembayaran pajak kepada Bank atas PPh Badan, dengan nilai netto sebesar Rp196.740 untuk tahun pajak 2014 setelah dikompensasi atas pajak terhutang sebesar Rp231 sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00070.PPH/WPJ.19/KP.04/2021 tanggal 13 Oktober 2021.

38. TAXATION (continued)

- e. Reduction of the Tax Rate of Corporate Income Tax (continued)

Assessment for fiscal year 2014

On March 11, 2022, the Tax Office has returned the overpayment of tax to the Bank for Corporate Income Tax, with net value of Rp196.74 for fiscal year 2014 after being compensated for tax payable amounting to Rp231 in accordance with KEP/00070.PPH/WPJ.19/KP.04/2021 dated October 13, 2021.

39. KOMITMEN DAN KONTINJENSI

Saldo komitmen dan kontinjensi pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
KOMITMEN			COMMITMENTS
Liabilitas komitmen			Commitments payable
Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik	18.933.652	15.109.981	Unused loan facility commitments
Irrevocable L/C yang masih berjalan (Catatan 27)	20.106	221.484	Outstanding irrevocable L/Cs (Note 27)
Komitmen - neto	18.953.758	15.331.465	Commitments - net
KONTINJENSI			CONTINGENCIES
Tagihan kontinjensi			Contingent receivables
Pendapatan bunga dalam penyelesaian	3.598.041	6.855.269	Interest income on non-performing assets
Liabilitas kontinjensi			Contingent payables
Garansi yang diterbitkan (Catatan 27)	(2.579.175)	(948.495)	Guarantees issued (Note 27)
Kontinjensi - neto	1.018.866	5.906.774	Contingencies - net

40. IMBALAN KERJA

Program pensiun imbalan pasti

Program dana Pensiun diadministrasikan dan dikelola oleh Dana Pensiun PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (DPBTN).

Sesuai dengan ketentuan Dana Pensiun, Program Pensiun dibiayai dari iuran karyawan dan iuran Bank. Iuran karyawan adalah sebesar 5% dari penghasilan dasar pensiun karyawan dan atas sisa jumlah yang perlu didanakan kepada DPBTN merupakan kontribusi Bank.

40. EMPLOYEE BENEFITS

Defined benefit pension plan

The Pension Plan's assets are being administered and managed by Dana Pensiun PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (DPBTN).

According to the Pension Fund regulation, the pension plan is funded through contributions from both the employees and the Bank. Employees' contributions are computed at 5% of the employees' basic pension salaries and any remaining amount required to fund DPBTN represents the contributions by the Bank.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

40. IMBALAN KERJA (lanjutan)

Program pensiun iuran pasti (lanjutan)

Efektif tanggal 1 Januari 2004, semua pekerja yang baru diangkat sebagai pekerja tetap tidak diikutsertakan dalam program pensiun imbalan pasti (DPBTN), namun demikian, karyawan Bank diikutsertakan dalam program pensiun iuran pasti yang berlaku efektif sejak bulan Januari 2004. Program Pensiun ini dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (DPLK).

Beban pensiun iuran pasti yang telah dibebankan pada laporan laba rugi adalah sebesar Rp43.871 dan Rp35.782 masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

Imbalan kerja jangka panjang lainnya

Bank memberikan imbalan kerja kepada pegawai berupa penghargaan masa kerja dan Masa Persiapan Pensiun (MPP) yaitu 1 (satu) tahun sebelum pegawai mencapai usia pensiun normal (usia 56 tahun).

Masa Persiapan Pensiun (MPP) adalah Masa Pegawai Tetap dibebastugaskan karena telah mendekati usia pensiun normal. Pada ketentuan sebelumnya (Surat Edaran Direksi Nomor 62/SE/DIR/HCSD/2019) dijelaskan bahwa Pegawai Tetap yang telah memasuki usia 55 tahun maka akan melaksanakan MPP dengan Hak upah berupa Gaji Pokok Pegawai bulan terakhir hingga Pegawai ybs memasuki usia pensiun (56 tahun), apabila dipandang perlu karena keahlian/pengalaman Pegawai Tetap yang bersangkutan masih diperlukan, Direksi dapat menangguhkan/menghapuskan MPP yang bersangkutan dan selama dipekerjakan yang bersangkutan tetap diberikan penghasilan seperti halnya pada waktu Pegawai Tetap tersebut masih aktif (sebelum MPP).

Terdapat perubahan ketentuan pelaksanaan MPP sebagaimana ditetapkan pada Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Bank BTN tahun 2022 pasal 69 ayat 1 dimana Pegawai yang memasuki usia MPP (55 tahun) maka akan tetap bekerja hingga usia pensiun (56 tahun) dan apabila Pegawai ingin menjalani MPP maka dapat mengajukan permohonan kepada Perusahaan. Perubahan ketentuan pelaksanaan MPP tersebut juga telah disosialisasikan kepada seluruh Pegawai Bank berdasarkan memo nomor 244/M/HCSD/HCSP/IX/2022 dan nomor 370/M/HCMD/ER/IX/2022 perihal Pemberitahuan Perubahan Ketentuan Masa Persiapan Pensiun (MPP).

40. EMPLOYEE BENEFITS (continued)

Defined contribution plan (continued)

Effective January 1, 2004, all newly appointed permanent employees are not included in the defined benefit pension plan (DPBTN), instead, the Bank's employees are included in the defined contribution pension plan which was effective since January 2004. This defined contribution pension plan is managed by Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (DPLK).

Defined contribution pension expense that was charged to profit or loss amounted to Rp43,871 and Rp35,782 for the years ended December 31, 2023 and 2022, respectively.

Other long-term employee benefits

The Bank provides employee benefits in the form of allowance for gratuity for services and retirement preparation period (MPP), which is within 1 (one) year before the normal pension age (56 years old).

Retirement Preparation Period (MPP) is the period when permanent employees are dismissed because they are approaching normal retirement age. In the previous provisions (Circular Letter of the Board of Directors Number 62/SE/DIR/HCSD/2019) it is explained that Permanent Employees who have entered the age of 55 will carry out MPP with Wage Rights in the form of the last month's Basic Employee Salary until the Employee concerned enters retirement age (56 years), if it is deemed necessary because the expertise/experience of the Permanent Employee concerned is still needed, the Board of Directors can suspend/remove the MPP concerned and while employed the person concerned is still given income as was the case when the Permanent Employee was still active (before MPP).

There are changes to the provisions for implementing MPP as stipulated in the Bank BTN Collective Labor Agreement (PKB) in 2022 article 69 paragraph 1 where Employees who enter MPP age (55 years) will continue to work until retirement age (56 years) and if Employees wish to undergo MPP then may apply to the Company. The changes to the MPP implementation provisions have also been socialized to all Bank employees based on memos number 244/M/HCSD/HCSP/IX/2022 and number 370/M/HCMD/ER/IX/2022 regarding Notification of Changes in Retirement Preparation Period (MPP).

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

40. IMBALAN KERJA (lanjutan)

Imbalan kerja jangka panjang lainnya (lanjutan)

Karyawan Bank juga memperoleh manfaat dari pemberian program kesejahteraan, kontribusi karyawan terhadap dana kesejahteraan sebesar 0,00% dikali gaji bersih dan kontribusi Bank sebesar 3,50%. Aset program diadministrasikan dan dikelola oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai PT Bank Tabungan Negara (YKPBTN).

Perhitungan aktuaris atas imbalan kerja pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah berdasarkan laporan aktuaris tanggal 5 Februari 2024 dan 13 Februari 2023 dari aktuaris Kantor Konsultan Aktuaria Santhi Devi dan Ardianto Handoyo dengan menggunakan metode "Projected Unit Credit".

40. EMPLOYEE BENEFITS (continued)

Other long-term employee benefits (continued)

Bank employees are also given welfare program, employees' contributions are 0.00% of their net wages for welfare program benefits and the Bank contributions are 3.50%. The plan assets are being administered and managed by Yayasan Kesejahteraan Pegawai PT Bank Tabungan Negara (YKPBTN).

The actuarial valuation of employee benefits as of December 31, 2023 and 2022, are based on the actuarial reports dated February 5, 2024 and February 13, 2023, of Kantor Konsultan Aktuaria Santhi Devi dan Ardianto Handoyo respectively, using the "Projected Unit Credit" method.

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
Asumsi ekonomi:			Economics assumptions:
Tingkat kenaikan penghasilan dasar pensiun	8,00%	6,00%	Basic pensionable annual salary increase rate
Tingkat diskonto per tahun sebelum usia pensiun normal	6,75%	7,00%	Annual discount rate before normal retirement age
Asumsi lainnya:			Other assumptions:
Usia pensiun normal	56 tahun/years	56 tahun/years	Normal retirement age
Tingkat mortalita (kematian)	TMI-2019	TMI-2019	Mortality rate
Tingkat cacat	1,00% mortalita/ mortality	1,00% mortalita/ mortality	Disability rate
Asumsi lainnya (lanjutan):			Other assumptions (continued):
Tingkat Diskonto per tahun untuk:			Annual Discount rate:
Imbalan Jangka Panjang Lainnya -			Other long-term benefits
Penghargaan Masa Kerja	6,75%	7,00%	Gratuity
Program Pesangon Pensiun -			Retirement severance program
Selisih DPLK	6,75%	7,00%	Difference from DPLK
Masa Persiapan Pensiun	6,75%	7,00%	Retirement Preparation Period
Program Pensiun Imbalan Pasti	6,75%	7,25%	Deferred Benefit Pension Plan
Program Kesejahteraan	6,75%	7,00%	Welfare Program
Tingkat pengunduran diri			Turnover rate
Umur 25	5,00%	5,00%	Age 25
Umur 30	5,00%	5,00%	Age 30
Umur 35	5,00%	5,00%	Age 35
Umur 40	5,00%	5,00%	Age 40
Umur 45	5,00%	5,00%	Age 45
Umur 50	4,00%	3,00%	Age 50
Umur 55	9,00%	9,00%	Age 55

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

40. IMBALAN KERJA (lanjutan)

Penghargaan masa kerja, program pesangon pensiun-selisih DPLK, masa persiapan pensiun dan program kesejahteraan dicantumkan dalam program lainnya.

40. EMPLOYEE BENEFITS (continued)

Gratuity for services, retirement severance program-difference from DPLK, retirement preparation period and welfare program are included in other benefits.

a. Biaya imbalan kerja

a. Employee benefits expense

31 Desember/December 31, 2023			
	Program Pensiun/ Pension Plan	Program Lainnya/ Other Benefits	Total
Biaya jasa kini	34.991	161.198	196.189
Iuran peserta	(6.526)	(6.729)	(13.255)
Beban bunga neto	1.271	63.231	64.502
Kerugian aktuarial	-	(41.361)	(41.361)
Biaya jasa lalu	(12.446)	(23.817)	(36.263)
Beban imbalan kerja - neto	17.290	152.522	169.812

Current service cost
Contribution from participant
Net interest cost
Actuarial loss
Past service cost

Employee benefits expense - net

31 Desember/December 31, 2022			
	Program Pensiun/ Pension Plan	Program Lainnya/ Other Benefits	Total
Biaya jasa kini	35.276	106.523	141.799
Iuran peserta	(7.050)	(7.153)	(14.203)
Beban bunga neto	5.394	46.104	51.498
Kerugian aktuarial	-	76.053	76.053
Biaya jasa lalu	11.460	256.180	267.640
Perubahan metode atribusi	-	(68.659)	(68.659)
Beban imbalan kerja - neto	45.080	409.048	454.128

Current service cost
Contribution from participant
Net interest cost
Actuarial loss
Past service cost
Change in benefit attribution method

Employee benefits expense - net

b. Mutasi atas kewajiban imbalan kerja

b. Movements of liabilities for employee benefits

31 Desember/December 31, 2023			
	Program Pensiun/ Pension Plan	Program Lainnya/ Other Benefits	Total
Saldo awal	107.214	966.297	1.073.511
Beban imbalan kerja tahun berjalan - neto	17.289	152.523	169.812
Pengukuran kembali liabilitas (aset) imbalan kerja - neto	76.466	109.561	186.027
Pembayaran iuran tahun berjalan	(45.186)	(104.822)	(150.008)
Saldo kewajiban pada akhir tahun (Catatan 28)	155.783	1.123.559	1.279.342

Beginning balance
Employee benefits expense during the year - net
Reameasurement of employee benefit liability (asset) - net
Payment contribution from current year

Balance liabilities at end of year (Note 28)

31 Desember/December 31, 2022			
	Program Pensiun/ Pension Plan	Program Lainnya/ Other Benefits	Total
Saldo awal	148.266	710.429	858.695
Beban imbalan kerja tahun berjalan - neto	45.080	409.048	454.128
Pengukuran kembali liabilitas (aset) imbalan kerja - neto	(49.512)	(10.360)	(59.872)
Pembayaran iuran tahun berjalan	(36.620)	(142.820)	(179.440)
Saldo kewajiban pada akhir tahun (Catatan 28)	107.214	966.297	1.073.511

Beginning balance
Employee benefits expense during the year - net
Reameasurement of employee benefit liability (asset) - net
Payment contribution from current year

Balance liabilities at end of year (Note 28)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

40. IMBALAN KERJA (lanjutan)

40. EMPLOYEE BENEFITS (continued)

- c. Mutasi nilai kini liabilitas imbalan kerja adalah sebagai berikut:

- c. The movements in the present value of liabilities for employee benefits are as follows:

31 Desember/December 31, 2023			
	Program Pensiun/ Pension Plan	Program Lainnya/ Other Benefits	Total
Saldo awal	2.226.053	1.930.356	4.156.409
Biaya jasa kini	34.991	161.198	196.189
Beban bunga	156.762	127.009	283.771
Biaya jasa lalu	(12.446)	(23.817)	(36.263)
Manfaat yang dibayarkan Kerugian/(keuntungan) aktuarial	(155.673)	(186.015)	(341.688)
	196.444	89.339	285.783
Saldo pada akhir tahun	2.446.131	2.098.070	4.544.201

Beginning balance
Current service cost
Interest cost
Past service cost
Benefits paid

Actuarial loss/(gain)

Balance at the end of year

31 Desember/December 31, 2022			
	Program Pensiun/ Pension Plan	Program Lainnya/ Other Benefits	Total
Saldo awal	2.186.761	1.633.262	3.820.023
Biaya jasa kini	35.276	106.523	141.799
Beban bunga	152.585	110.738	263.323
Biaya jasa lalu	11.460	256.180	267.640
Manfaat yang dibayarkan	(140.158)	(208.970)	(349.128)
Perubahan metode atribusi	-	(68.660)	(68.660)
Kerugian/(keuntungan) aktuarial	(19.871)	101.283	81.412
Saldo pada akhir tahun	2.226.053	1.930.356	4.156.409

Beginning balance
Current service cost
Interest cost
Past service cost
Benefits paid

Change in benefit attribution method

Actuarial loss/(gain)

Balance at the end of year

- d. Mutasi nilai wajar aset program adalah sebagai berikut:

- d. The movements in the fair value of plan assets are as follows:

31 Desember/December 31, 2023			
	Program Pensiun/ Pension Plan	Program Lainnya/ Other Benefits	Total
Saldo awal	2.118.844	1.030.736	3.149.580
Hasil pengembangan aset program	275.470	116.700	392.170
Kontribusi Bank	45.183	26.056	71.239
Kontribusi pegawai	6.526	6.729	13.255
Manfaat yang dibayarkan	(155.673)	(107.231)	(262.904)
Saldo pada akhir tahun	2.290.350	1.072.990	3.363.340

Beginning balance

Return on plan asset
Contributions by the Bank
Employees contribution
Benefits paid

Balance at the end of year

31 Desember/December 31, 2022			
	Program Pensiun/ Pension Plan	Program Lainnya/ Other Benefits	Total
Saldo awal	2.038.499	995.996	3.034.495
Hasil pengembangan aset program	176.833	93.752	270.585
Kontribusi Bank	36.620	29.036	65.656
Kontribusi pegawai	7.050	7.153	14.203
Manfaat yang dibayarkan	(140.158)	(95.201)	(235.359)
Saldo pada akhir tahun	2.118.844	1.030.736	3.149.580

Beginning balance

Return on plan asset
Contributions by the Bank
Employees contribution
Benefits paid

Balance at the end of year

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

40. IMBALAN KERJA (lanjutan)

40. EMPLOYEE BENEFITS (continued)

- e. Pengukuran kembali (aset) liabilitas imbalan kerja neto:

- e. Remeasurement of net employee benefit (asset) liabilities:

31 Desember/December 31, 2023				
	Program Pensiun/ Pension Plan	Program Lainnya/ Other Benefits	Total	
Saldo awal	145.559	360.188	505.747	Beginning balance
Kerugian aktuaris	196.444	130.699	327.143	Actuary loss
Imbal hasil atas aset program	(119.979)	(46.916)	(166.895)	Return on plan assets
Perubahan atas dampak atas aset diluar bunga neto aset/liabilitas	-	25.781	25.781	Change in effect of the asset ceiling excluding net interest of asset/liabilities
Saldo pada akhir tahun	222.024	469.752	691.776	Balance at the end of year

31 Desember/December 31, 2022				
	Program Pensiun/ Pension Plan	Program Lainnya/ Other Benefits	Total	
Saldo awal	195.072	370.549	565.621	Beginning balance
Kerugian aktuaris	(19.871)	25.231	5.360	Actuary loss
Imbal hasil atas aset program	(29.642)	(21.199)	(50.841)	Return on plan assets
Perubahan atas dampak atas aset diluar bunga neto aset/liabilitas	-	(14.391)	(14.391)	Change in effect of the asset ceiling excluding net interest of asset/liabilities
Saldo pada akhir tahun	145.559	360.190	505.749	Balance at the end of year

- f. Portofolio investasi aset program yang ditempatkan dalam bentuk instrumen keuangan yang terdiri dari reksadana, efek beragunan aset, surat berharga negara, obligasi, deposito berjangka dan saham.

- f. The asset program's investment portfolio is placed in the form of financial instruments including mutual funds, asset backed securities, government securities, bonds, time deposits and shares of stocks.

Status pendanaan imbalan kerja per 31 Desember 2023 dan 2022 disajikan sebagai berikut:

Funding status of employee benefit as of December 31, 2023 and 2022 are as follow:

31 Desember/December 31, 2023				
	Program Pensiun/ Pension Plan	Program Kesejahteraan/ Welfare Benefits	Total	
Nilai wajar aset dana (tidak diaudit)	2.290.350	1.072.990	3.363.340	Fair value of plan assets (unaudited)
Nilai kini liabilitas manfaat pasti yang didanai	(2.446.131)	(974.509)	(3.420.640)	Present value of funded defined benefit obligation
Selisih lebih (kurang) pendanaan	(155.781)	98.481	(57.300)	Funding surplus (deficit)
Selisih lebih pendanaan yang tidak diakui	-	(98.481)	(98.481)	Asset adjustment
Kewajiban - neto	(155.781)	-	(155.781)	Liabilities - net

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

40. IMBALAN KERJA (lanjutan)

- f. Portofolio investasi aset program yang ditempatkan dalam bentuk instrumen keuangan yang terdiri dari reksadana, efek beragunan aset, surat berharga negara, obligasi, deposito berjangka dan saham. (lanjutan)

Status pendanaan imbalan kerja per 31 Desember 2023 dan 2022 disajikan sebagai berikut: (lanjutan)

31 Desember/December 31, 2022				
	Program Pensiun/ Pension Plan	Program Kesejahteraan/ Welfare Benefits	Total	
Nilai wajar aset dana (tidak diaudit)	2.118.844	1.030.736	3.149.580	Fair value of plan assets (unaudited)
Nilai kini liabilitas manfaat pasti yang didanai	(2.226.053)	(964.038)	(3.190.091)	Present value of funded defined benefit obligation
Selisih lebih (kurang) pendanaan	(107.209)	66.698	(40.511)	Funding surplus (deficit)
Selisih lebih pendanaan yang tidak diakui	-	(66.698)	(66.698)	Asset adjustment
Kewajiban - neto	(107.209)	-	(107.209)	Liabilities - net

Per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, tidak ada selisih lebih aset kesejahteraan yang diakui di laporan posisi keuangan karena ketentuan untuk pengakuan aset dari selisih lebih pendanaan yang disyaratkan dalam standar akuntansi tidak terpenuhi.

As of December 31, 2023 and 2022, there were no recognition of surplus of Welfare Benefits Plan assets in the statement of financial position as the funding surplus did not meet the recognition criteria of assets under the accounting standards.

- g. Sensitivitas dari kewajiban imbalan kerja (tidak diaudit) terhadap perubahan asumsi aktuarial sebagai berikut:

- g. The sensitivity of employee benefit liability (unaudited) to the changes in actuarial assumptions is as follow:

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
Tingkat diskonto			Discount rate:
Kenaikan 1%	(360.599)	(363.644)	Increase 1%
Penurunan 1%	425.590	431.961	Decrease 1%
Tingkat kenaikan gaji			Salary increase rate:
Kenaikan 1%	237.562	221.622	Increase 1%
Penurunan 1%	(163.484)	(191.781)	Decrease 1%

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

40. IMBALAN KERJA (lanjutan)

40. EMPLOYEE BENEFITS (continued)

- h. Analisis jatuh tempo yang diharapkan dari manfaat pensiun yang tidak terdiskonto adalah sebagai berikut: (tidak diaudit)

- h. Expected maturity analysis of undiscounted pension benefit is as follows: (unaudited)

31 Desember/December 31, 2023			
	Program Pensiun/ Pension Plan	Program Lainnya/ Other Benefits	Total
Sampai dengan 1 tahun	176.478	256.396	432.874
1 sampai 5 tahun	878.676	1.046.050	1.924.726
5 sampai 10 tahun	1.027.144	848.474	1.875.618
Total	2.082.298	2.150.920	4.233.218

Up to 1 year
Between 1 to 5 years
Between 5 to 10 years
Total

31 Desember/December 31, 2022			
	Program Pensiun/ Pension Plan	Program Lainnya/ Other Benefits	Total
Sampai dengan 1 tahun	127.654	278.591	406.245
1 sampai 5 tahun	835.385	978.527	1.813.912
5 sampai 10 tahun	1.064.334	641.241	1.705.575
Total	2.027.373	1.898.359	3.925.732

Up to 1 year
Between 1 to 5 years
Between 5 to 10 years
Total

Rata-rata durasi tertimbang kewajiban imbalan pasti adalah sebagai berikut:

The average duration of the defined benefit obligations are as follow:

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	
Pensiun	10,09 tahun/years	10,05 tahun/years	Pension
Kesejahteraan	9,82 tahun/years	9,50 tahun/years	Welfare benefit
Program lainnya			Other programs:
Pesangon	10,28 tahun/years	7,49 tahun/years	Post employment benefit
Masa persiapan pensiun	10,28 tahun/years	7,67 tahun/years	Pre-retirement benefit
Imbalan jangka panjang lainnya	10,28 tahun/years	7,49 tahun/years	Other long term benefit

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

40. IMBALAN KERJA (lanjutan)

i. Risiko

Bank terespos beberapa risiko atas program imbalan kerja antara lain:

- Risiko yang terekspos pada program iuran pasti adalah hasil investasi dibawah tingkat diskonto. Akumulasi iuran aktual lebih kecil dari nilai yang diasumsikan sehingga mengakibatkan selisih pembayaran terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan akan meningkat dan berdampak pada beban dan liabilitas yang akan meningkat pula.
- Risiko yang terekspos pada program manfaat pasti adalah adanya tingkat hasil investasi dibawah asumsi *discount rate* dan kenaikan gaji aktual yang lebih besar dari asumsi. Hal tersebut menimbulkan peningkatan iuran yang dibayarkan kepada Dana Pensiun.

Pada bulan April 2022, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia menerbitkan materi penjelasan melalui siaran pers atas persyaratan pengatribusian imbalan pada periode jasa sesuai PSAK No. 24, "Imbalan Kerja" yang diadopsi dari IAS 19, "Employee Benefits". Materi penjelasan tersebut menyampaikan informasi bahwa pola fakta umum dari program pensiun berbasis undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia saat ini memiliki pola fakta serupa dengan yang ditanggapi dan disimpulkan dalam IFRS *Intepretation Committee Agenda Decision Attributing Benefit to Periods of Service* (IAS 19). Dampak perubahan perhitungan tersebut adalah tidak material sehingga dibukukan seluruhnya pada laporan keuangan tahun berjalan.

40. EMPLOYEE BENEFITS (continued)

i. Risk

The Bank is exposed to a number of risks through its employee benefit plans as follows:

- The exposed risks in defined contribution plan is lower return on investment compared to assumption on discount rate. The accumulated actual contribution to be lower than its assumption resulted increase the difference in the amount of contribution based on Labor Law, and will also increase the amount of the related expenses and liabilities.
- The exposed risks in defined benefit pension plan is the lower return on investment compared to assumption on discount rate and the increase in the actual salary is higher than its assumption. These will cause an increase in contribution paid to Pension Fund.

In April 2022, Institute of Indonesia Chartered Accountants' Accounting Standard Board issued an explanatory material through a press release regarding attribution of benefits to periods of service in accordance with PSAK No. 24, "Employee Benefits" which was adopted from IAS 19, "Employee Benefits". The explanatory material conveyed the information that the fact pattern of the pension program based on the labor law currently enacted in Indonesia is similar to those responded and concluded in the IFRS *Intepretation Committee Agenda Decision Attributing Benefit to Periods of Service* (IAS 19). The impact of the changes of calculation is immaterial, therefore the impact of the changes is recorded entirely in the financial statements for the current year.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

41. PELAPORAN SEGMENT

Informasi segmen usaha berdasarkan jenis usaha adalah sebagai berikut:

41. SEGMENT REPORTING

Segment information based on business type are as follows:

	31 Desember/December 31, 2023				
	Konvensional/ Conventional	Syariah/ Sharia	Eliminasi/ Elimination	Total	
Pendapatan segmen	24.722.529	3.558.723	-	28.281.252	Segment income
Beban segmen	(13.406.425)	(1.444.537)	-	(14.850.962)	Segment expenses
Pendapatan segmen - neto	11.316.104	2.114.186	-	13.430.290	Segment Income - net
Pendapatan operasional lainnya	4.161.842	154.971	(425.666)	3.891.147	Other operating income
Penyisihan kerugian penurunan nilai aset keuangan dan non-aset keuangan	(3.653.668)	(111.729)	-	(3.765.397)	Provision for impairment losses on financial assets and non-financial assets
Pembalikkan penyisihan estimasi kerugian komitmen dan kontijensi bersih	1.139	-	-	1.139	Reversal for allowance for estimated losses from commitment & contingencies
Beban operasional lainnya	(7.988.114)	(1.455.002)	425.666	(9.017.450)	Other operating expenses
Laba operasional	3.837.303	702.426	-	4.539.729	Income from operations
Pendapatan (beban) bukan operasional - neto	(159.428)	(91)	-	(159.519)	Non-operating income (expenses) - net
Beban pajak				(879.222)	Tax expense
Laba tahun berjalan				3.500.988	Income for the year
Total aset	392.854.285	54.288.709	(8.393.258)	438.749.736	Total assets
Total liabilitas dan dana syirkah temporer	363.082.327	53.581.515	(8.393.258)	408.270.584	Total liabilities and temporary syirkah fund
	31 Desember/December 31, 2022				
	Konvensional/ Conventional	Syariah/ Sharia	Eliminasi/ Elimination	Total	
Pendapatan segmen	23.233.200	2.674.168	-	25.907.368	Segment income
Beban segmen	(10.036.723)	(873.361)	-	(10.910.084)	Segment expenses
Pendapatan segmen - neto	13.196.477	1.800.807	-	14.997.284	Segment Income - net
Pendapatan operasional lainnya	2.405.171	78.845	(209.164)	2.274.852	Other operating income
Penyisihan kerugian penurunan nilai aset keuangan dan non-aset keuangan	(3.414.717)	(602.661)	-	(4.017.378)	Provision for impairment losses on financial assets and non-financial assets
Pembalikkan penyisihan estimasi kerugian komitmen dan kontijensi bersih	(1.074)	-	-	(1.074)	Reversal for allowance for estimated losses from commitment & contingencies
Beban operasional lainnya	(8.704.656)	(943.389)	209.164	(9.438.881)	Other operating expenses
Laba operasional	3.481.201	333.602	-	3.814.803	Income from operations
Pendapatan (beban) bukan operasional - neto	60.912	(25)	-	60.887	Non-operating income (expenses) - net
Beban pajak				(830.617)	Tax expense
Laba tahun berjalan				3.045.073	Income for the year
Total aset	364.284.663	45.335.575	(7.471.926)	402.148.312	Total assets
Total liabilitas dan dana syirkah temporer	338.723.316	44.987.568	(7.471.926)	376.238.958	Total liabilities and temporary syirkah fund

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

42. JAMINAN PEMERINTAH TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK UMUM

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 15 tahun 2004 tentang pengakhiran tugas dan pembubaran BPPN, dinyatakan dalam pasal 8 bahwa dengan diakhirinya tugas dan dibubarkannya BPPN, Program Penjaminan Pemerintah terhadap kewajiban pembayaran bank umum yang semula dilakukan oleh BPPN berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 26 tahun 1998 dan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 27 tahun 1998, selanjutnya dilaksanakan oleh Menteri Keuangan melalui Unit Pelaksanaan Penjaminan Pemerintah (UP3) sebagaimana diatur oleh Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 17 tahun 2004, yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 84/KMK.06/2004 tanggal 27 Februari 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.179/KMK.017/2000 tentang Syarat, Tata cara dan Ketentuan Pelaksanaan Jaminan Pemerintah terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum.

Program Penjaminan Pemerintah melalui UP3 telah berakhir pada tanggal 22 September 2005, sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 68/PMK.05/2005 tanggal 10 Agustus 2005 tentang Perhitungan Dan Pembayaran Premi Program Penjaminan Terhadap Pembayaran Bank Umum untuk periode 1 Juli sampai 21 September 2005. Sebagai pengganti UP3 Pemerintah telah membentuk Lembaga Independen, yaitu Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 24 tahun 2004 tanggal 22 September 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan dimana LPS menjamin dana masyarakat termasuk dana dari bank lain dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Berdasarkan salinan Peraturan LPS No. 1/PLPS/2006 tanggal 9 Maret 2006 tentang "Program Penjaminan Simpanan" diatur besarnya saldo yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank adalah paling tinggi sebesar Rp100 juta.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2008 tanggal 13 Oktober 2008 tentang "Besaran Nilai Simpanan yang Dijamin Lembaga Penjamin Simpanan" maka nilai simpanan setiap nasabah pada satu bank yang dijamin oleh Pemerintah naik menjadi sebesar Rp2 miliar dari semula Rp100 juta, efektif sejak tanggal tersebut di atas.

42. GOVERNMENT GUARANTEES ON THE OBLIGATIONS OF COMMERCIAL BANKS

Based on Decision No. 15 year 2004 of the President of the Republic of Indonesia regarding the termination of the role and winding-up of IBRA, stated on article 8 that in relation with the task completion and dismissal of IBRA, the Government Guarantee Program on the obligations of domestic banks which was originally handled by IBRA based on the Decisions of the President of the Republic of Indonesia No. 26 year 1998 and No. 27 year 1998 would be handled by the Ministry of Finance, specifically by the Government Guarantee Implementation Unit Pelaksanaan Penjaminan Pemerintah (UP3) as provided in the Decision of the President of the Republic of Indonesia No. 17 year 2004, which was further regulated by the Decision No. 84/KMK.06/2004 dated February 27, 2004 of the Ministry of Finance regarding the Amendment of Decision No. 179/KMK.017/2000 of the Ministry of Finance on the Terms, Implementation Guidelines, and Conditions of the Government Guarantees on the obligations of commercial banks.

The Guarantee Program by the Government through UP3 ended on September 22, 2005, as stated in Regulation No. 68/PMK.05/2005 dated August 10, 2005 of the Ministry of Finance concerning the Calculation and Payments of Premium on Guarantee Program from Commercial Banks for the period July 1 to September 21, 2005. The Government established the Deposit Insurance Corporation (LPS), an independent agency, to replace UP3, based on Law No. 24 year 2004 dated September 22, 2004 of the Republic of Indonesia regarding the establishment Deposit Insurance Corporation (LPS) to guarantee public funds including funds from other banks in the form of demand deposits, time deposits, certificates of deposit, savings deposits and/or other equivalent form.

Based on LPS regulation No. 1/PLPS/2006 dated March 9, 2006 regarding "Government Guarantee Program on Saving Account", the balance of saving accounts guaranteed for each customer is at a maximum of Rp100 million.

In accordance with Government Regulation No. 66 of 2008, dated October 13, 2008 regarding "The Amount of Public Savings Guaranteed by the Indonesia Deposit Insurance Corporation", the total amount of customers' saving accounts in banks which is guaranteed by the Government has increased to Rp2 billion, from the previous Rp100 million, effective on the date stated above.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

42. JAMINAN PEMERINTAH TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK UMUM (lanjutan)

Suku bunga penjaminan LPS pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar 4,25% dan 3,75% untuk simpanan dalam mata uang Rupiah, dan masing-masing sebesar 2,25% dan 1,75% untuk simpanan dalam mata uang asing.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Bank telah membayar premi program penjaminan masing-masing sebesar Rp656.774 dan Rp599.991.

42. GOVERNMENT GUARANTEES ON THE OBLIGATIONS OF COMMERCIAL BANKS (continued)

LPS interest rates guarantee as of December 31, 2023 and 2022 were 4.25% and 3.75% for each deposits in Rupiah and 2.25% and 1.75% for deposits in foreign currencies.

The Bank paid a premium on the guarantee program amounting to Rp656,774 and Rp599,991 as of December 31, 2023 and 2022, respectively.

43. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI

Dalam kegiatan normal usaha, Bank melakukan transaksi dengan pihak berelasi karena hubungan kepemilikan dan/atau kepengurusan. Semua transaksi dengan pihak-pihak berelasi telah dilakukan dengan kebijakan dan syarat yang telah disepakati bersama.

Tabel di bawah menunjukkan rincian pihak-pihak berelasi dengan Bank beserta sifat dari transaksi yang dilakukan oleh Bank tersebut pada tahun 31 Desember 2023 dan 2022:

43. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

In the normal course of business, the Bank enters into certain transactions with parties which are related to the management and/or owned by the same ultimate shareholder. All transactions with related parties have been entered into the agreed terms and conditions.

The table below details the related parties of the Bank along with the nature of transactions entered into by the Bank during December 31, 2023 and 2022:

<u>Pihak-pihak berelasi/ Related parties</u>	<u>Jenis hubungan/ Type of relationship</u>	<u>Unsur transaksi pihak berelasi/ Nature of related party transactions</u>
Pemerintah Republik Indonesia (RI)	Pemegang saham mayoritas melalui Kementerian Keuangan RI/ Majority shareholder through the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia	Obligasi Pemerintah, Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah/ Government Bonds, Loans and sharia financing/receivables
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia	Giro pada bank lain, Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain, Efek-efek, Liabilitas Akseptasi, Pinjaman yang diterima dan Surat Berharga yang Diterbitkan/Current accounts with other banks, Placement with Bank Indonesia and Other Banks, Securities, Acceptances Payable, Fund Borrowing and Securities issued
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia	Giro pada bank lain, Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain, Efek-efek, Surat Berharga yang Diterbitkan, Liabilitas Akseptasi/ Current accounts with other banks, Placement with Bank Indonesia and Other Banks, Securities and Securities issued, Acceptances Payable
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia	Giro pada bank lain, Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain, Efek-efek, dan Surat Berharga yang Diterbitkan/ Current accounts with other banks, Placement with Bank Indonesia and Other Banks, Securities and Securities issued

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

43. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI
(lanjutan)

Tabel di bawah menunjukkan rincian pihak-pihak berelasi dengan Bank beserta sifat dari transaksi yang dilakukan oleh Bank tersebut pada tahun 31 Desember 2023 dan 2022 (lanjutan):

43. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES
(continued)

The table below details the related parties of the Bank along with the nature of transactions entered into by the Bank during December 31, 2023 and 2022 (continued):

<u>Pihak-pihak berelasi/</u> <u>Related parties</u>	<u>Jenis hubungan/</u> <u>Type of relationship</u>	<u>Unsur transaksi pihak berelasi/</u> <u>Nature of related party transactions</u>
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia	Giro pada bank lain, dan Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain/ Current accounts with other banks, and Placement with Bank Indonesia and Other Banks
PT Bank Mandiri Taspen	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)	Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain, Efek-efek/Placement with Bank Indonesia and Other Banks and Securities
PT Bank Raya Tbk (dahulu PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk)	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)	Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain, Simpanan dari Bank Lain dan Surat Berharga yang Diterbitkan/ Placement with Bank Indonesia and Other Banks, Deposits from Other Banks, Securities issued
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia	Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain, Efek-efek/Placement with Bank Indonesia and Other Banks, Securities
PT Utama Karya (Persero)	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah, Tagihan Akseptasi/Loans and sharia financing/receivables, Acceptance Receivable
Perum Perumnas	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia	Efek-efek, dan Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah/Securities, and Loans and sharia financing/receivables
PT PP Properti Tbk	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)	Tagihan Akseptasi dan Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah/Acceptances Receivable and Loans and sharia financing/receivables
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)	Tagihan Akseptasi dan Garansi yang diterbitkan/Acceptances Receivable and Guarantees issued
PT Wijaya Karya Industri Energi	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)	Tagihan Akseptasi/Acceptances Receivable

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

43. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI
(lanjutan)

Tabel di bawah menunjukkan rincian pihak-pihak berelasi dengan Bank beserta sifat dari transaksi yang dilakukan oleh Bank tersebut pada tahun 31 Desember 2023 dan 2022 (lanjutan):

43. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES
(continued)

The table below details the related parties of the Bank along with the nature of transactions entered into by the Bank during December 31, 2023 and 2022 (continued):

<u>Pihak-pihak berelasi/</u> <u>Related parties</u>	<u>Jenis hubungan/</u> <u>Type of relationship</u>	<u>Unsur transaksi pihak berelasi/</u> <u>Nature of related party transactions</u>
PT Wijaya Karya Industri & Konstruksi	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ <i>Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)</i>	Tagihan Akseptasi/Acceptances Receivable
Perum Percetakan Negara Republik Indonesia (Perum PNRI)	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ <i>Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah/Loans and sharia financing/receivables
PT Danareksa Investment Management	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ <i>Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)</i>	Efek-Efek dan Surat Berharga yang Diterbitkan/Securities and Securities Issued
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ <i>Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah/Loans and sharia financing/receivables
PT Angkasa Pura II (Persero)	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ <i>Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah/Loans and sharia financing/receivables
PT Dok Dan Perkapalan Surabaya (Persero)	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ <i>Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah/Loans and sharia financing/receivables
PT HK Realtindo	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ <i>Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)</i>	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah/Loans and sharia financing/receivables
PT Indah Karya (Persero)	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ <i>Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah/Loans and sharia financing/receivables
PT Jasamarga Bali Tol	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ <i>Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)</i>	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah/Loans and sharia financing/receivables
PT Mandiri Manajemen Investasi	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ <i>Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)</i>	Efek-Efek dan Surat Berharga yang Diterbitkan/Securities and Securities issued
PT Patra Jasa	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ <i>Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)</i>	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah/Loans and sharia financing/receivables

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

43. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI
(lanjutan)

Tabel di bawah menunjukkan rincian pihak-pihak berelasi dengan Bank beserta sifat dari transaksi yang dilakukan oleh Bank tersebut pada tahun 31 Desember 2023 dan 2022 (lanjutan):

43. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES
(continued)

The table below details the related parties of the Bank along with the nature of transactions entered into by the Bank during December 31, 2023 and 2022 (continued):

<u>Pihak-pihak berelasi/</u> <u>Related parties</u>	<u>Jenis hubungan/</u> <u>Type of relationship</u>	<u>Unsur transaksi pihak berelasi/</u> <u>Nature of related party transactions</u>
PT Permodalan Nasional Madani	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ <i>Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)</i>	Efek-Efek, Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah/Securities, Loans and sharia financing/receivables
PT Amarta Karya (Persero)	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ <i>Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah/Loans and sharia financing/receivables
PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ <i>Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Efek-Efek dan Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah/Securities and Loans and sharia financing/receivables
PT Taspen (Persero)	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ <i>Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Surat Berharga yang Diterbitkan/ <i>Securities issued</i>
PT Virama Karya (Persero)	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ <i>Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah dan Garansi yang diterbitkan/Loans and sharia financing/receivables and Guarantees issued
PT Waskita Bumi Wira	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ <i>Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)</i>	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah/Loans and sharia financing/receivables
PT Waskita Karya Realty	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ <i>Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)</i>	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang Syariah/Loans and sharia financing/receivables
PT PPA Finance	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ <i>Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)</i>	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah/Loans and sharia financing/receivables
PT Waskita FIM Perkasa Realti	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ <i>Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)</i>	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah/Loans and sharia financing/receivables
PT Pertamina (persero)	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ <i>Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah dan efek-efek/Loans and sharia financing/receivables and Securities

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

43. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI
(lanjutan)

Tabel di bawah menunjukkan rincian pihak-pihak berelasi dengan Bank beserta sifat dari transaksi yang dilakukan oleh Bank tersebut pada tahun 31 Desember 2023 dan 2022 (lanjutan):

43. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES
(continued)

The table below details the related parties of the Bank along with the nature of transactions entered into by the Bank during December 31, 2023 and 2022 (continued):

<u>Pihak-pihak berelasi/</u> <u>Related parties</u>	<u>Jenis hubungan/</u> <u>Type of relationship</u>	<u>Unsur transaksi pihak berelasi/</u> <u>Nature of related party transactions</u>
PT Yodya Karya (Persero)	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ <i>Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah dan Garansi yang diterbitkan/Loans and sharia financing/receivables and Guarantees issued
PT Adhi Persada Properti	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ <i>Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)</i>	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah/Loans and sharia financing/receivables
PT Perumnas Jakabaring	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ <i>Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)</i>	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah/Loans and sharia financing/receivables
PT Perumnas Sentraland	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ <i>Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)</i>	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah/Loans and sharia financing/receivables
PT Perumnas TOD Tanjung	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ <i>Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)</i>	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah/Loans and sharia financing/receivables
PT Sinergi Investasi Properti	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ <i>Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)</i>	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah/Loans and sharia financing/receivables
PT Perumnas Pondok Cina	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ <i>Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)</i>	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah/Loans and sharia financing/receivables
PT Adhi Commuter Properti	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ <i>Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)</i>	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah dan Tagihan Lain-Lain/Loans and sharia financing/receivables and Other receivables
PT Angkasa Pura I (Persero)	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ <i>Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah dan efek-efek/Loans and sharia financing/receivables and securities Efek-efek/Securities Penyisihan kerugian penurunan nilai aset keuangan dan aset non keuangan/Provision for impairment losses on financial and non-financial assets
PT Jalin Pembayaran Nusantara	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ <i>Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)</i>	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah/Loans and sharia financing/receivables

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

43. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI
(lanjutan)

Tabel di bawah menunjukkan rincian pihak-pihak berelasi dengan Bank beserta sifat dari transaksi yang dilakukan oleh Bank tersebut pada tahun 31 Desember 2023 dan 2022 (lanjutan):

43. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES
(continued)

The table below details the related parties of the Bank along with the nature of transactions entered into by the Bank during December 31, 2023 and 2022 (continued):

<u>Pihak-pihak berelasi/ Related parties</u>	<u>Jenis hubungan/ Type of relationship</u>	<u>Unsur transaksi pihak berelasi/ Nature of related party transactions</u>
PT Reasuransi Nasional Indonesia	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ <i>Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)</i>	Surat Berharga yang Diterbitkan / <i>Securities issued</i>
PT Tugu Reasuransi Indonesia	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ <i>Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)</i>	Surat Berharga yang Diterbitkan/ <i>Securities issued</i>
PT Puspertino	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ <i>Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)</i>	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah/Loans and sharia financing/receivables
PT Asuransi Kredit Indonesia	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ <i>Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)</i>	Surat Berharga yang Diterbitkan dan Garansi yang diterbitkan/Securities Issued and Guarantees issued
PT Asuransi Jasa Indonesia	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ <i>Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)</i>	Surat Berharga yang Diterbitkan/ <i>Securities issued</i>
PT Asuransi Jasa Raharja	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ <i>Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)</i>	Surat Berharga yang Diterbitkan/ <i>Securities issued</i>
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ <i>Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Kredit yang diberikan dan Efek-efek/ <i>Loans and sharia financing/receivables and Securities</i>
PT Nindya Karya (Persero)	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ <i>Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)</i>	Kredit yang diberikan dan Garansi yang diterbitkan/Loans and sharia financing/receivables and Guarantees issued
PT Centurion Perkasa Iman	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ <i>Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)</i>	Kredit yang diberikan dan Garansi yang diterbitkan/Loans and sharia financing/receivables and Guarantees issued
PT Energi Pelabuhan Indonesia	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ <i>Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)</i>	Garansi yang diterbitkan/ <i>Guarantees issued</i>
Perum Jaminan Kredit Indonesia	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ <i>Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Surat Berharga yang Diterbitkan/ <i>Securities issued</i>
PT Daya Mitra Telekomunikasi	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ <i>Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)</i>	Efek-efek/ <i>Securities</i>
PT Industri Kereta Api	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ <i>Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)</i>	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang Syariah /Loans and sharia financing/receivables

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

43. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI
(lanjutan)

Tabel di bawah menunjukkan rincian pihak-pihak berelasi dengan Bank beserta sifat dari transaksi yang dilakukan oleh Bank tersebut pada tahun 31 Desember 2023 dan 2022 (lanjutan):

43. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES
(continued)

The table below details the related parties of the Bank along with the nature of transactions entered into by the Bank during December 31, 2023 and 2022 (continued):

<u>Pihak-pihak berelasi/ Related parties</u>	<u>Jenis hubungan/ Type of relationship</u>	<u>Unsur transaksi pihak berelasi/ Nature of related party transactions</u>
PT AXA Mandiri Financial Services	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ <i>Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)</i>	Surat Berharga yang Diterbitkan/ <i>Securities issued</i>
PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ <i>Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Surat Berharga yang Diterbitkan/ <i>Securities issued</i>
PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ <i>Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Surat Berharga yang Diterbitkan/ <i>Securities issued</i>
PT Tugu Pratama Indonesia	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ <i>Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)</i>	Surat Berharga yang Diterbitkan/ <i>Securities issued</i>
PT Sarana Multigriya Finance (Persero)	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ <i>Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Efek - Efek, Pinjaman yang diterima dan Pinjaman Subordinasi dan efek-efek subordinasi/ <i>Securities, Fund borrowings and Subordinated Loan and securities</i>
PT Sinergi Colomadu	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ <i>Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)</i>	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah/ <i>Loans and sharia financing/receivables</i>
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ <i>Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Efek-Efek/ <i>Securities</i>
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ <i>Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Efek - Efek/ <i>Securities</i>
PT PP Properti Jababeka Residence	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ <i>Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)</i>	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah/ <i>Loans and sharia financing/receivables</i>
PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ <i>Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Efek - Efek/ <i>Securities</i> Pendapatan dari penerimaan kredit yang dihapus bukukan/ <i>Income from recovery of loans written off</i>

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

43. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI
(lanjutan)

Tabel di bawah menunjukkan rincian pihak-pihak berelasi dengan Bank beserta sifat dari transaksi yang dilakukan oleh Bank tersebut pada tahun 31 Desember 2023 dan 2022 (lanjutan):

43. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES
(continued)

The table below details the related parties of the Bank along with the nature of transactions entered into by the Bank during December 31, 2023 and 2022 (continued):

<u>Pihak-pihak berelasi/</u> <u>Related parties</u>	<u>Jenis hubungan/</u> <u>Type of relationship</u>	<u>Unsur transaksi pihak berelasi/</u> <u>Nature of related party transactions</u>
PT Pegadaian	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ <i>Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)</i>	Efek-Efek/Securities
PT BNI Asset Management	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ <i>Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)</i>	Surat Berharga yang Diterbitkan dan efek-efek/ Securities issued and securities
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ <i>Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Efek-efek/ Securities
Peruri Properti	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ <i>Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)</i>	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah dan Garansi yang diterbitkan/Loans and sharia financing/receivables and Guarantees issued
PT Waskita Beton Precast Tbk	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ <i>Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)</i>	Efek-efek/ Securities
PT BRI Manajemen Investasi	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ <i>Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)</i>	Efek-efek/ Securities
PT Pos Indonesia (Persero)	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ <i>Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)</i>	Garansi yang diterbitkan/ Guarantees issued
PT Telkom Satelit Indonesia	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ <i>Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)</i>	Garansi yang diterbitkan/ Guarantees issued
PT Inhutani V	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ <i>Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)</i>	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah/Loans and sharia financing/receivables
Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ <i>Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Pinjaman dan Efek-Efek Subordinasi/ Subordinated Loan and Securities

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

43. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI
(lanjutan)

Tabel di bawah menunjukkan rincian pihak-pihak berelasi dengan Bank beserta sifat dari transaksi yang dilakukan oleh Bank tersebut pada tahun 31 Desember 2023 dan 2022 (lanjutan):

43. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES
(continued)

The table below details the related parties of the Bank along with the nature of transactions entered into by the Bank during December 31, 2023 and 2022 (continued):

<u>Pihak-pihak berelasi/</u> <u>Related parties</u>	<u>Jenis hubungan/</u> <u>Type of relationship</u>	<u>Unsur transaksi pihak berelasi/</u> <u>Nature of related party transactions</u>
PT PP Urban	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ <i>Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)</i>	Garansi yang diterbitkan, Tagihan lain-lain, Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah / <i>Guarantees issued, Other receivables, Loans and sharia financing/receivables</i>
PT Aviati Pariwisata Indonesia (Persero)	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ <i>Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah/ <i>Loans and sharia financing/receivables</i>
PT Bio Farma (Persero)	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ <i>Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah/ <i>Loans and sharia financing/receivables</i>
PT Inka Multi Solusi Service	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ <i>Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)</i>	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang Syariah dan Tagihan lain-lain/ <i>Loans and sharia financing/receivables and Other receivables</i>
PT PAL Indonesia (Persero)	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ <i>Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah dan Garansi yang diterbitkan/ <i>Loans and sharia financing/receivables and Guarantees issued</i>
PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero)	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ <i>Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah/ <i>Loans and sharia financing/receivables</i>
Perum Pengangkutan Penumpang Jakarta	Dalam pengendalian yang sama melalui pemerintah pusat RI/ <i>Under common control through the Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah/ <i>Loans and sharia financing/receivables</i>
PT Wika Realty	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ <i>Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)</i>	Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah/ <i>Loans and sharia financing/receivables</i>
PT Wika Gedung	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ <i>Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)</i>	Tagihan lain-lain/ <i>Other receivables</i>
PT Bahana TCW Investment Management	Entitas Anak dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ <i>Subsidiary of State Owned Enterprise (SOE)</i>	Efek-efek/ <i>Securities</i>
Manajemen Kunci termasuk Direksi, Komisaris, Komite Audit, Kepala Divisi dan Kepala Cabang/ <i>Key Management including Director, Commissioner, Audit Committee, Head Division and Branch Manager</i>	Hubungan pengendalian kegiatan perusahaan/ <i>Control on company's activities</i>	Kredit yang Diberikan dan Pembiayaan/piutang Syariah, Simpanan dari Nasabah, dan Dana Syariah Temporer/ <i>Loans and sharia financing/receivables, Deposit from Customers and Temporary Syariah Fund</i>

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

43. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI
(lanjutan)

- a. Transaksi dengan pihak berelasi karena hubungan kepemilikan dengan pemerintah Republik Indonesia:

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022
Aset		
Giro pada bank lain (Catatan 6)	1.049.449	508.322
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain (Catatan 7)	61	61
Efek-efek (Catatan 8)	3.851.105	850.059
Obligasi pemerintah (Catatan 9)	35.893.929	51.964.973
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah (Catatan 11)	27.678.581	19.594.018
Tagihan akseptasi (Catatan 13)	68.746	131.356
Tagihan lain-lain	106.385	61.169
Total aset untuk pihak-pihak berelasi	68.648.256	73.109.958
Cadangan kerugian penurunan nilai dari pihak-pihak berelasi	(1.227.528)	(900.235)
Total dari aset pihak-pihak berelasi - neto	67.420.728	72.209.723
Persentase total aset pihak berelasi terhadap total aset	15,37%	17,96%

43. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES
(continued)

- a. Transactions with related parties due to ownership relation with government of the Republic of Indonesia:

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022
Assets		
Current accounts with other banks (Note 6)		
Placements with Bank Indonesia and other banks (Note 7)		
Securities (Note 8)		
Government bonds (Note 9)		
Loans and sharia financing/receivables (Note 11)		
Acceptance receivable (Note 13)		
Other Receivables		
Total assets to related parties		
Allowance for impairment losses for related parties		
Total assets from related parties - net		
Percentage of total assets from related parties to total assets		

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022
Liabilitas		
Simpanan dari nasabah (Catatan 18, 19 dan 20)	196.674.002	173.906.896
Liabilitas Akseptasi (Catatan 22)	224.045	118.525
Surat-surat berharga yang diterbitkan (Catatan 23)	5.868.525	4.355.008
Pinjaman yang diterima (Catatan 24)	22.453.290	17.455.685
Pinjaman Subordinasi dan efek-efek subordinasi (Catatan 25)	4.499.997	4.499.977
Total liabilitas untuk pihak-pihak berelasi	229.719.859	200.336.091
Persentase total liabilitas pihak berelasi terhadap total liabilitas	60,27%	57,01%

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022
Liabilities		
Deposits from customers (Notes 18, 19 and 20)		
Acceptance payable (Note 22)		
Securities issued (Note 23)		
Fund borrowings (Note 24)		
Subordinated loan and securities (Note 25)		
Total liabilities to related parties		
Percentage of total liabilities from related parties to total liabilities		

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

43. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI
(lanjutan)

43. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES
(continued)

- a. Transaksi dengan pihak berelasi karena hubungan kepemilikan dengan pemerintah Republik Indonesia (lanjutan):

- a. Transactions with related parties due to ownership relation with government of the Republic of Indonesia (continued):

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
Dana Syirkah Temporer			Temporary Syirkah Funds
Giro Mudharabah (Catatan 18)	11.271	11.897	Mudharabah current accounts (Note 18)
Tabungan Mudharabah (Catatan 19)	133.630	83.465	Mudharabah savings deposits (Note 19)
Deposito Mudharabah (Catatan 20)	8.899.072	7.631.970	Mudharabah time deposits (Note 20)
Total dana syirkah temporer untuk pihak-pihak berelasi	9.043.973	7.727.332	Total temporary syirkah funds to related parties
Persentase total dana syirkah temporer berelasi terhadap dana syirkah temporer	33,37%	31,08%	Percentage of total temporary syirkah funds related parties to total temporary syirkah funds
	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
Pendapatan bunga dan bagi hasil			Interest income and income from profit sharing
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	490.024	282.311	Placements with Bank Indonesia and other banks
Efek-efek	299.741	216.020	Securities
Obligasi pemerintah	1.220.648	1.518.936	Government bonds
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah	1.195.910	1.081.237	Loans and sharia financing/receivables
Total pendapatan bunga dan bagi hasil dari pihak-pihak berelasi	3.206.323	3.098.504	Total interest income and income from profit sharing from related parties
Persentase terhadap total pendapatan bunga dan bagi hasil	11,34%	11,96%	Percentage to total interest income and income from profit sharing
	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
Pendapatan dari penerimaan kredit yang dihapusbukukan	374.257	-	Income from recovery of loans written-off
Persentase terhadap total pendapatan dari penerimaan kredit yang dihapusbukukan	40,06%	-	Percentage of total income from recovery of loans writtirn off

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

43. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI
(lanjutan)

- a. Transaksi dengan pihak berelasi karena hubungan kepemilikan dengan pemerintah Republik Indonesia (lanjutan):

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022
Beban bunga, bagi hasil dan bonus		
Simpanan dari nasabah	3.137.470	2.642.731
Simpanan dari bank lain	2.647	781
Surat-surat berharga yang diterbitkan	433.269	455.401
Pinjaman yang diterima	965.111	843.147
Efek- efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	34.593	4.894
Pinjaman subordinasi dan efek-efek subordinasi	381.770	381.760
Giro Mudharabah	18	181
Tabungan Mudharabah	1.896	6.521
Deposito Mudharabah	149.498	80.613
Total beban bunga dan bonus dari pihak berelasi	5.106.272	4.416.029
Persentase terhadap total beban bunga, bagi hasil dan bonus	34,38%	40,48%

43. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES
(continued)

- a. Transactions with related parties due to ownership relation with government of the Republic of Indonesia (continued):

Interest, profit sharing and bonus expenses

Deposits from customers
Deposits from other banks
Securities issued
Fund borrowings
Securities sold under repurchase agreement
Subordinated loan and securities
Mudharabah current accounts
Mudharabah savings deposits
Mudharabah time deposits

Total interest and bonus expenses from related parties

Percentage to total interest, profit sharing and bonus expense

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022
Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan dan Aset Non Keuangan	803.278	-
Presentase terhadap total penyisihan Kerugian penurunan nilai aset Keuangan dan aset non keuangan	21,33%	-

Provision for Impairment Losses on Financial and Non-financial Assets

Percentage to total provision for impairment losses on financial and non-financial assets

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022
Komitmen dan Kontinjensi pada Rekening Administratif (Catatan 27)		
Garansi yang diterbitkan	1.116.581	426.438
Irrevocable L/C yang masih berjalan	8.840	115.445
Total komitmen dan kontinjensi pada rekening administratif dari pihak berelasi	1.125.421	541.883
Presentase terhadap total komitmen dan kontinjensi pada rekening administratif	41,28%	43,35%

Commitments and Contingencies in Administrative Accounts (Note 27)

Guarantees issued
Outstanding irrevocable LCs

Total commitments and contingencies in administrative accounts

Percentage to total commitments and contingencies in administrative accounts

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

43. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI
(lanjutan)

43. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES
(continued)

b. Transaksi dengan manajemen kunci (lanjutan)

b. Transactions with key management personnel (continued)

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022
Kredit yang diberikan dan piutang/ pembiayaan syariah (Catatan 11)	94.105	102.781
Cadangan kerugian penurunan nilai dari pihak-pihak berelasi	(288)	(374)
Total dari aset pihak-pihak berelasi - neto	93.817	102.407
Persentase terhadap total aset	0,02%	0,03%

Loan and sharia
financing/receivables (Note 11)
Allowance for impairment losses
for related parties

**Total assets from related parties
- net**

Percentage to total assets

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022
Liabilitas		
Simpanan dari nasabah (Catatan 18, 19 dan 20)	186.924	115.340
Liabilitas imbalan kerja	288.487	268.476
Total liabilitas dari manajemen kunci	475.411	383.816
Persentase terhadap total liabilitas	0,12%	0,11%

Liabilities

Deposits from customers
(Notes 18, 19 and 20)
Employee benefits liability

**Total liabilities from key
management personnel**

Percentage to total liabilities

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022
Dana Syirkah Temporer		
Giro Mudharabah (Catatan 18)	2.203	-
Tabungan Mudharabah (Catatan 19)	8.363	4.962
Deposito Mudharabah (Catatan 20)	9.297	5.221
Total dana syirkah temporer untuk pihak-pihak berelasi	19.863	10.183
Persentase total dana syirkah temporer berelasi terhadap dana syirkah temporer	0,07%	0,04%

Temporary Syirkah Funds

Mudharabah current accounts (Note 18)
Mudharabah savings deposits (Note 19)
Mudharabah time deposits (Note 20)

**Total temporary syirkah
funds to related parties**

**Percentage of total temporary syirkah
funds related parties to total
temporary syirkah funds**

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022
Pendapatan bunga dan bagi hasil		
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah	6.821	6.929
Persentase terhadap total pendapatan bunga dan bagi hasil	0,02%	0,03%

**Interest income and income
from profit sharing**
Loans and sharia financing/
receivables

**Percentage to total interest
income and income from
profit sharing**

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

43. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI
(lanjutan)

b. Transaksi dengan manajemen kunci (lanjutan)

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022
Beban bunga, bagi hasil dan bonus		
Simpanan dari nasabah	1.446	1.564
Dana Syirkah	402	168
Total beban bunga, bagi hasil, dan bonus	1.848	1.732

Persentase terhadap total beban bunga, bagi hasil, dan bonus	0,01%	0,03%

	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022
Imbalan jangka pendek:		
Direksi (Catatan 1i)	161.529	131.671
Dewan komisaris (Catatan 1i)	64.480	51.960
Karyawan kunci lain	216.253	221.825
Imbalan pasca kerja:		
Karyawan kunci lain	200.829	182.874
Imbalan jangka Panjang lainnya:		
Karyawan kunci lain	87.658	85.602
Total	730.749	673.932

Persentase terhadap total beban gaji dan tunjangan karyawan	18,35%	16,08%

Interest, profit sharing and bonus expenses
Deposits from customers
Mudharabah savings deposits

Total interest, profit sharing and bonus expense

Percentage to total interest, profit sharing and bonus expense

Short-term employee benefits:
Board of directors (Note 1i)
Board of commissioners (Note 1i)
Other key employees

Post-employee benefits:
Other key employees

Other long term benefits:
Other key employees

Total

Percentage to total salaries and employee benefits

44. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA UANG ASING

Posisi Devisa Neto

Perhitungan Posisi Devisa Neto (PDN) didasarkan pada Peraturan Bank Indonesia No. 5/13/PBI/2003 tanggal 17 Juli 2003 sebagaimana telah diubah dengan perubahan keempat Peraturan Bank Indonesia No. 17/5/PBI/2015 tanggal 29 Mei 2015. Berdasarkan peraturan tersebut, Bank diwajibkan untuk menjaga rasio PDN laporan posisi keuangan dan secara keseluruhan maksimum 20% dari jumlah modal. PDN adalah penjumlahan nilai absolut yang dinyatakan dalam Rupiah dari selisih bersih antara aset dan liabilitas dalam mata uang asing dan selisih bersih dari tagihan dan liabilitas komitmen dan kontinjensi yang dicatat dalam rekening administratif yang didenominasi dalam setiap mata uang asing.

44. ASSETS AND LIABILITIES DENOMINATED IN FOREIGN CURRENCIES

Net Open Position

The Net Open Position (NOP) is calculated based on Bank Indonesia Regulation No. 5/13/PBI/2003 dated July 17, 2003 which was fourth amended by Bank Indonesia Regulation No. 17/5/PBI/2015 dated May 29, 2015. Based on this regulation, the Bank is required to maintain Net Open Position ratio of the overall statement of financial position at a maximum of 20% of the total capital. The NOP is the sum of the absolute values, which are stated in Rupiah, of the net difference between the assets and liabilities denominated in each foreign currency and the net difference of the receivables and payables of both commitments and contingencies recorded in the administrative accounts denominated in each foreign currency.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

44. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA UANG ASING (lanjutan)

44. ASSETS AND LIABILITIES DENOMINATED IN FOREIGN CURRENCIES (continued)

PDN Bank pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022:

The Bank's NOP as of December 31, 2023 and 2022 are as follows:

31 Desember/December 31, 2023			Posisi Devisa Neto/ Net Open Position	
Aset/Assets	Liabilitas/Liabilities			
<u>Laporan posisi keuangan dan Rekening administratif</u>				<u>Statement of financial position and Administrative accounts</u>
Dolar Australia	177.633	(20.421)	157.212	Australian Dollar
Dolar Amerika Serikat	30.741.381	(30.627.376)	114.005	United States Dollar
Yen Jepang	850.554	(759.435)	91.119	Japanese Yen
Pound Sterling Inggris	86.071	-	86.071	Great Britain Pound Sterling
Euro Eropa	81.632	(1.337)	80.295	European Euro
Dolar Singapura	39.205	(47.435)	8.230	Singapore Dollar
Renminbi	3.497	(19)	3.478	Renminbi
Dolar Hong Kong	371s	-	371	Hong Kong Dollar
Ringgit Malaysia	303	-	303	Malaysian Ringgit
Riyal Arab Saudi	140	-	140	Saudi Arabian Riyal
			541.224	
Modal (Catatan 45)			31.230.282	Capital (Note 45)
Rasio PDN			1,73%	NOP ratio
31 Desember/December 31, 2022			Posisi Devisa Neto/ Net Open Position	
Aset/Assets	Liabilitas/Liabilities			
<u>Laporan posisi keuangan dan Rekening administratif</u>				<u>Statement of financial position and Administrative accounts</u>
Dolar Amerika Serikat	7.622.973	(8.311.493)	688.520	United States Dollar
Yen Jepang	480.099	(808.933)	328.834	Japanese Yen
Dolar Singapura	36.865	(24.018)	12.847	Singapore Dollar
Dolar Australia	48.406	(4)	48.402	Australian Dollar
Renminbi	1.089	(8)	1.081	Renminbi
Ringgit Malaysia	292	(10)	282	Malaysian Ringgit
Euro Eropa	31.464	(328)	31.136	European Euro
Pound Sterling Inggris	63.405	(11)	63.394	Great Britain Pound Sterling
Dolar Hong Kong	97	-	97	Hong Kong Dollar
Riyal Arab Saudi	81	-	81	Saudi Arabian Riyal
			1.174.674	
Modal (Catatan 45)			28.168.457	Capital (Note 45)
Rasio PDN			4,17%	NOP ratio

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**45. RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL
MINIMUM (KPMM)**

Bank secara aktif mengelola modalnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa setiap saat Bank dapat menjaga kecukupan modalnya untuk menutup risiko bawaan (*inherent risks*) pada kegiatan perbankan tanpa mengurangi optimalisasi nilai pemegang saham.

KPMM pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dihitung berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 27/POJK.03/2022, POJK No.34/POJK.03/2016 dan POJK No. 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.

Berdasarkan POJK No. 27/POJK.03/2022 tentang Perubahan Kedua atas POJK No.11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum, PBI No. 17/22/PBI/2015 tentang Kewajiban Pembentukan *Countercyclical Buffer* dan POJK No. 46/POJK.03/2015 tentang Penetapan *Systemically Important Bank* dan *Capital Surcharge*, Bank diwajibkan membentuk tambahan modal sebagai penyangga (*buffer*) yang berlaku secara bertahap mulai 1 Januari 2016. Pembentukan modal *buffer* yaitu *Capital Conservation Buffer*, *Countercyclical Buffer* dan *Capital Surcharge* untuk D-SIB yang wajib dibentuk berdasarkan persentase tertentu dari Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) masing-masing sebesar 2,50%, 0,00% dan 1,00%.

Berdasarkan POJK No 48/POJK.03/2020 tanggal 1 Desember 2020 tentang Perubahan atas POJK No.11/POJK.03/2020 tanggal 27 Mei 2020, untuk kebijakan relaksasi dalam rangka mendukung program pemulihan ekonomi nasional sektor perbankan, bahwa kewajiban pemenuhan *Capital Conservation Buffer* dalam komponen modal diiadakan sampai dengan 31 Maret 2022.

Berdasarkan profil risiko Bank masing-masing per 31 Desember 2023 dan 2022, yaitu *low to moderate*, maka rasio kecukupan modal (KPMM) minimum per 31 Desember 2023 dan 2022 ditetapkan masing-masing sebesar 9% sampai dengan 9%.

Penentuan kepatuhan Bank terhadap peraturan dan rasio yang berlaku didasarkan pada peraturan praktik akuntansi yang berbeda dalam beberapa hal dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

**45. MINIMUM REQUIRED CAPITAL ADEQUACY
RATIO (CAR)**

The Bank actively manages its capital in accordance with the regulatory requirements. The primary objective of which is to ensure that the Bank, at all times, maintains adequate capital to cover inherent risks to its banking activities without prejudice to optimizing shareholder's value.

CAR on December 31, 2023 and 2022 was calculated based on Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 27/POJK.03/2022, POJK No. 34/POJK.03/2016 and POJK No. 11/POJK.03/2016 concerning the Minimum Capital Requirement for Commercial Banks.

Based on POJK No. 27/POJK.03/2022 concerning of Second Change Regulation No. 11/POJK.03/2016 concerning the Minimum Capital Requirement for Commercial Banks, PBI No. 17/22/PBI/2015 concerning the Establishment of *Countercyclical Buffer Requirement*, and POJK No. 46/POJK.03/2015 concerning the Determination of *Systemically Important Bank* and *Capital Surcharge*, the Bank is required to form additional capital as a buffer that apply in stages starting on January 1, 2016. The establishment of buffer capital consists of *Capital Conservation Buffer*, *Countercyclical Buffer*, and *Capital Surcharge* for D-SIB which shall be established based on a percentage of Risk Weighted Assets (RWA) of 2.50%, 0.00% and 1.00%, respectively.

Based on POJK No. 48/POJK.03/2020 as of December 1, 2020 concerning the amendments of POJK No.11/POJK.03/2020 dated May 27, 2020 for relaxation policy in order to support the national economic recovery program of the banking sector, that the obligation to fulfill the *Capital Conservation Buffer* in the capital component is removed until March 31, 2022.

Based on the risk profile as of December 31, 2023 and 2022, respectively, which are both low to moderate, the minimum CAR for December 31, 2023 and 2022, is set at 9% to less than 9%, respectively.

The determination of the Bank's compliance with regulations and applicable ratios are based on the accounting rules which is differ in several aspects with the Financial Accounting Standards in Indonesia.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

45. RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL
MINIMUM (KPMM) (lanjutan)

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Bank telah memenuhi rasio sesuai yang disyaratkan Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan untuk KPMM.

Perhitungan KPMM Bank pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

45. MINIMUM REQUIRED CAPITAL ADEQUACY
RATIO (CAR) (continued)

As of December 31, 2023 and 2022, the Bank has fulfilled the required ratios of Bank Indonesia and/or Financial Services Authority for the CAR.

The computation of the Bank's CAR as of December 31, 2023 and 2022 follows:

		31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2022	
Modal inti	a	27.154.078	22.533.407	Core Capital
Modal pelengkap (Maksimal 100% dari modal inti)	b	4.076.204	5.635.050	Supplementary Capital (Maximum of 100% of Core Capital)
Modal pelengkap tambahan yang dialokasikan untuk mengantisipasi risiko pasar	c	-	-	Additional supplementary capital allocated for anticipation of market risk
Jumlah Modal Inti dan Modal Pelengkap	d=a+b	31.230.282	28.168.457	Total Core Capital and Supplementary Capital
Jumlah modal inti, modal pelengkap dan modal pelengkap tambahan yang dialokasikan untuk mengantisipasi risiko pasar	e=c+d	31.230.282	28.168.457	Total core capital, supplementary capital and additional supplementary capital allocated for anticipation of market risk
Penyertaan	f	-	-	Investment
Jumlah modal untuk risiko kredit	g=d-f	31.230.282	28.168.457	Total capital for credit risk
Jumlah modal untuk risiko kredit dan risiko pasar	h=e-f	31.230.282	28.168.457	Total capital for credit risk and market risk
Aset tertimbang menurut risiko kredit	i	136.691.761	114.318.357	Risk weighted assets credit risk
ATMR untuk risiko pasar	j	942.326	1.373.299	RWA for market risk
ATMR untuk risiko operasional	k	17.956.060	23.938.858	RWA for operational risk
Jumlah ATMR untuk risiko kredit dan risiko operasional	l=i+k	154.647.821	138.257.215	Total RWA for credit risk and operational risk
Jumlah ATMR untuk risiko kredit, risiko operasional dan risiko pasar	m=i+j+k	155.590.147	139.630.514	RWA for Credit Risk, Operational Risk and market risk
CAR untuk risiko kredit dan risiko operasional	n=g/l	20,19%	20,37%	CAR for credit risk and operational risk
CAR untuk risiko kredit risiko operasional, dan risiko pasar	o=h/m	20,07%	20,17%	CAR for credit risk Operational risk and market risk
CAR Minimum yang Diwajibkan		9%	9%	Minimum CAR

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

46. MANAJEMEN RISIKO

Bank portofolio asetnya didominasi oleh Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang dipengaruhi oleh adanya perubahan iklim bisnis eksternal seperti inflasi dan tingkat BI rate. Upaya meminimalkan dampak negatif tersebut dilakukan dengan pengelolaan risiko secara *day to day risk management activities*, dengan berlandaskan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) untuk memastikan seluruh proses dan mekanisme yang terjadi dalam mencapai tujuan perusahaan, mencegah perusahaan dari penyimpangan dan risiko yang dapat mengakibatkan kegagalan pencapaian tujuan perusahaan, serta berlandaskan prinsip kehati-hatian untuk memastikan pertumbuhan kinerja Bank yang sehat dan berkesinambungan.

Sebagai tindak lanjut penerapan Pilar 1 Basel II, Bank telah mengimplementasikan pengukuran risiko kredit dengan menggunakan *Standardized Approach* sesuai dengan SEOJK No. 24/SEOJK.03/2021 tanggal 7 Oktober 2021 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar Bagi Bank Umum. Selain dari itu Bank juga telah melakukan perhitungan kebutuhan modal minimum dengan menggunakan *Standardized Approach* sesuai dengan SEOJK No. 6/SEOJK.03/2020 tanggal 29 April 2020 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Operasional dengan Menggunakan Pendekatan Standar Bagi Bank Umum. Penggunaan *Standardized Model* untuk risiko pasar sesuai dengan SEOJK No. 38/SEOJK.03/2016 tanggal 8 September 2016 perihal Pedoman Penggunaan Metode Standar dalam Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dengan Memperhitungkan Risiko Pasar.

Guna melengkapi pengukuran risiko khususnya risiko pasar dan risiko likuiditas, Bank melakukan *stress test* dengan *worst case scenario*. Selain melakukan *scenario analysis* terhadap aktivitas bank secara keseluruhan, Bank juga melakukan *scenario analysis* terhadap aktivitas tertentu, khususnya aktivitas baru, yang berpotensi meningkatkan eksposur risiko suku bunga. *Stress Test* yang dilakukan oleh Bank fokus pada 3 (tiga) jenis risiko yaitu risiko kredit, risiko pasar dan risiko likuiditas. Untuk menyempurnakan pengukuran risiko khususnya risiko pasar, risiko likuiditas dan risiko kredit, Bank melakukan *stress test* terhadap *worst case scenario* sebagaimana diatur dalam SE Direksi No. 21/SE/DIR/ERMD/2019 tanggal 15 Mei 2019 perihal Petunjuk Pelaksanaan *Stress Testing* dengan frekuensi minimal 1 (satu) tahun sekali untuk risiko kredit dan risiko pasar serta per triwulan untuk risiko likuiditas.

46. RISK MANAGEMENT

The bulk of the Bank's loan portfolio consists of mortgage loans (KPR) that are affected by changes in the external business environment such as inflation and the BI rate. Efforts to minimize the negative impact is being done through risk management activities on a daily basis, with the principles of Good Corporate Governance (GCG) as the basis to ensure that all the processes and mechanisms in connection to achieve the Bank's objectives, to prevent the bank from deviations and risks that can lead to failure in achieving corporate objectives. The principle of prudence is the basis of risk management activities to ensure the healthy growth of the Bank's performance and sustainability.

As a follow up to the implementation of Pillar 1 of Basel II, the Bank has implemented a credit risk measurement using the *Standardized Approach* in accordance with SEOJK No.24/SEOJK.03/2021 dated in Oct 7, 2021 regarding the Guidelines for Calculation of Risk Weighted Assets (RWA) for Credit Risk by using *Standardized Approach*. Apart from that, the Bank has been calculating the minimum capital requirements using the *Standardized Approach* for operational risk in accordance with SEOJK No. 6/SEOJK.03/2020 dated in April 29, 2020 regarding the calculation of risk weighted assets (RWA) for Operational Risk. The use of *Standardized Method* for market risk are in accordance with SEOJK No. 38/SEOJK.03/2016 dated in September 8, 2016 regarding the Guidelines for the Use of *Standardized Method* in the Calculation of Capital Adequacy Ratio on Market Risk for Commercial Banks.

In measuring risks, particularly market risk and liquidity risk, the Bank conducts stress testing using worst case scenario in addition to scenario analysis of the Bank's activities as a whole. The Bank also performs scenario analysis on specific activities, especially new activity, which could potentially increase the interest rate risk exposure. Currently, the stress tests conducted by the Bank is focused on 3 (three) types of risks, namely, credit risk, market risk (including interest rate risk) and liquidity risk. To improve the measurement of market risk, liquidity risk and credit risk, the Bank conduct stress test on worst case scenario as regulated in Director Circular Letter No. 21/SE/DIR/ERMD/2019 dated in May 15, 2019 regarding The Guidelines of Implementation for Stress Testing with a minimum frequency of 1 (one) year for credit risk and market risk and quarterly for liquidity risk.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

46. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Bank melakukan *stress testing* secara berkala untuk menilai kecukupan modal dalam hal terjadinya kejadian-kejadian risiko yang bersifat ekstrim atau *catastrophe*. *Stress Testing* Risiko Likuiditas telah dilakukan sebanyak 4 kali yaitu disampaikan melalui laporan Profil Risiko Triwulan I/2023, Triwulan II/2023, Triwulan III/2023 dan Triwulan IV/2023. *Stress Testing* Risiko Kredit dan Risiko Pasar dilakukan sedikitnya sekali dalam satu tahun dan dilakukan sebanyak 1 kali dimana pelaporan tahun 2023 akan disampaikan kepada OJK.

Manajemen Risiko Kredit dalam kondisi Pandemi COVID-19 untuk mendukung upaya pemerintah dalam mempertahankan stabilitas ekonomi, Bank telah menyiapkan kebijakan restrukturisasi kredit bagi debitur yang terdampak COVID-19 melalui Ketentuan Internal baik berupa Surat Edaran maupun Surat Keputusan Direksi sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran COVID-19 yang diberlakukan sejak tanggal 24 Maret 2020. Dalam kebijakan tersebut telah diatur kriteria debitur dan sektor usaha terdampak COVID-19 yang dapat dilakukan restrukturisasi. Relaksasi dilakukan khusus untuk debitur dan sektor yang terdampak COVID-19 dengan mengacu pada POJK No. 11/POJK.03/2020 yang diperbaharui POJK No. 17/POJK.03/2021 dan POJK No. 48/POJK.03/2020, Peraturan Menko Perekonomian No. 6/ 2020 dan ketentuan internal Bank. Selain itu, pengambilan keputusan dilakukan dengan prinsip *four eyes* yang melibatkan Satuan Kerja Bisnis dan Satuan Kerja Pengelola Risiko Kredit Ritel maupun Satuan Kerja Pengelola Risiko Kredit Komersial untuk menjaga prinsip kehati-hatian. Bank telah menyusun skema restrukturisasi dengan pola penundaan pembayaran kewajiban kredit. Dalam upaya mitigasi terjadi risiko kredit. Bank memperketat analisa bagi debitur yang mengajukan permohonan restrukturisasi dan meminimalisasi risiko pemberian restrukturisasi yang tidak tepat sasaran serta untuk menghindari *moral hazard*. Pemberian stimulus hanya dapat diberikan kepada debitur yang memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Bank. Penetapan debitur yang memenuhi kriteria tersebut juga melibatkan Satuan Kerja Manajemen Risiko (*unit risk management*) sebagai pihak yang independen. Dalam pelaksanaan pemberian stimulus dan untuk menghindari adanya *free rider (moral hazard)*, Bank BTN selalu mengacu pada regulasi dan mengikuti tata kelola yang baik (GCG).

46. RISK MANAGEMENT (continued)

The Bank conducts periodic stress testing to assess capital adequacy in anticipation of the occurrence of risk events that are extreme or catastrophic. Stress Testing for liquidity risk has been carried out 4 times, which is submitted through the Risk Profile report for Quarter I/2023, Quarter II/2023, Quarter III/2023 and Quarter IV/2023. Market Risk and Credit Risk Stress Testing is conducted at least once a year and conducted once in 2023 and the report will be submitted to the OJK.

Credit Risk Management during the COVID-19 Pandemic: In order to support the government's efforts to maintain economic stability, the Bank has prepared a credit restructuring policy for debtors affected by COVID-19 through Internal Regulations in the form of a Directors Circular and Directors Decree as a Countercyclical Policy in handling The Impact of the Spread of COVID-19 which was effective on March 24, 2020. The policy has stipulated criteria for debtors and business sectors affected by COVID-19 that can be restructured. Relaxation is allowed specifically for debtors and sectors affected by COVID-19 by referring to POJK Number 11/POJK.03/2020 which was updated by POJK No. 17/POJK.03/2021 and POJK Number 48/POJK.03/2020, Regulation of the Coordinating Minister for Economic Affairs Number 6/2020 and Bank BTN internal regulations. In addition, decision making is carried out using the four eyes principle which involves the Business Work Unit and Retail Credit Risk Management Work Unit and Commercial Credit Risk Management Work Unit to maintain the principle of prudence. The bank has created a restructuring scheme with a pattern of postponing payment of credit obligations. In efforts to mitigate credit risk occurs. The Bank will tighten the assessment for debtors who apply for restructuring and minimize the risk of restructuring that is not right on target and to avoid moral hazard. The stimulus can only be given to debtors who meet the criteria set by the Bank. Determination of debtors who meet these criteria also involves the Risk Management Unit as an independent party. In the implementation of providing stimulus and to avoid free riders (*moral hazard*), Bank BTN always refers to regulations and follows good corporate governance (GCG).

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

46. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Dengan diterapkannya kebijakan tersebut diharapkan debitur-debitur Bank yang terdampak pandemi COVID-19 dapat terbantu, sehingga kualitas portfolio Bank dapat tetap dijaga dengan baik. Dalam kaitan dengan kondisi Pandemi COVID-19 yang tengah berlangsung, Bank melakukan sejumlah penyesuaian pada proses dan mekanisme monitoring kredit, baik terhadap debitur secara individual maupun portofolio. Sejumlah penyesuaian ini dilakukan agar hasil monitoring senantiasa dapat memberikan *early warning signal* dan penetapan mitigasi risiko dapat tepat guna dalam menjaga kualitas kredit selama masa pandemi. Penyesuaian mekanisme monitoring kredit dilakukan melalui analisa *watchlist* terhadap seluruh debitur terutama entitas debitur yang berada pada sektor usaha terdampak COVID-19 dengan mengacu pada POJK No. 48 /POJK.03/2020 dan ketentuan internal Bank. Debitur yang berpotensi mengalami penurunan kinerja wajib dipantau dengan rencana *action plan* yang dipantau pelaksanaannya secara berkelanjutan, selain itu pengendalian pencairan kredit terhadap debitur yang mengalami restrukturisasi kredit (terutama yang melalui skema Stimulus Perekonomian Nasional POJK No. 11/POJK.03/2020) sehingga tujuan restrukturisasi dapat dicapai dengan tepat guna. Manajemen Risiko Kredit melakukan reviu sebagai perlakuan debitur restrukturisasi yang terdampak pandemi Covid-19 agar dapat meminimalisasi terjadinya *default* bagi Bank, serta dilakukan analisa proyeksi terhadap kondisi debitur sebagai langkah antisipasi Bank, dengan tetap mengacu pada peraturan pemerintah dan regulator yang berlaku. Terhadap skema restrukturisasi debitur, Bank melakukan sejumlah penyesuaian ketentuan proses restrukturisasi kredit dengan mengacu pada POJK No. 48 /POJK.03/2020 dan kebijakan internal terkait dengan pemberian stimulus perekonomian bagi debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19. Adapun penyesuaian ketentuan restrukturisasi melalui stimulus perekonomian mencakup: kriteria debitur restrukturisasi, sektor usaha yang terdampak COVID-19, mekanisme dan skema restrukturisasi, kewenangan memutus, penetapan kualitas kredit serta pelaporan kepada regulator. Penyesuaian ketentuan proses restrukturisasi kredit terdampak COVID-19 ini diharapkan dapat membantu debitur Bank serta kualitas portfolio kredit Bank senantiasa terjaga dengan baik.

46. RISK MANAGEMENT (continued)

The implementation of this policy is expected to help Bank's debtors who are affected by COVID-19 pandemic, so that the quality of the Bank's portfolio can be well maintained. In the ongoing COVID-19 pandemic, the Bank made several adjustments to the credit monitoring process and mechanism, both for debtors as an individual and portfolios. This adjustment is made for the purposes that monitoring results can always provide early warning signals and determine risk mitigation to be effective in maintaining credit quality during the pandemic period. Adjustments to the credit monitoring mechanism are carried out through watchlist analysis of all debtors, especially debtor entities that are in the business sector affected by COVID-19 with reference to POJK Number 48 /POJK.03/2020 and the Bank's internal regulations. Debtors that have the potential to experience a decline in performance must be monitored with an action plan that is monitored for its implementation on an ongoing basis, in addition to controlling credit disbursement of debtors who are experiencing credit restructuring (especially those through the National Economic Stimulus scheme POJK Number 11/ POJK.03/2020) therefore restructuring objectives can be achieved efficiently. Credit Risk Management conducts a review as a treatment for restructured debtors who are affected by covid19 in order to minimize the occurrence of defaults for the Bank, as well as a projection analysis of the condition of the Covid-19 restructured debtor as a precautionary measure for the Bank by still referring to applicable government and regulatory regulations. For the debtor restructuring scheme, the Bank made several adjustments to the provisions of the credit restructuring process by referring to POJK Number 48 /POJK.03/2020 and internal policies related to providing economic stimulus for debtors affected by the spread of COVID-19. The adjustment of restructuring provisions through economic stimulus includes: criteria for restructuring debtors, business sectors affected by COVID-19, restructuring mechanisms and schemes, decision authority, determination of credit quality and reporting to regulators. Adjustments to the provisions of the credit restructuring process affected by COVID-19 are expected to be able to help Bank debtors and the quality of the Bank's credit portfolio is always well maintained.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

46. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Dalam rangka meningkatkan dan mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam bisnis *Commercial dan Corporate Loan* serta meningkatkan pendapatan Bank dapat melalui pemberian fasilitas *Credit Line* kepada Non Lembaga Keuangan. Dalam proses pemberian Fasilitas *Credit Line* kepada Non Lembaga Keuangan sudah melibatkan unit manajemen risiko kredit mulai dari pengumpulan data hingga proses keputusan pemberian Fasilitas *Credit Line* kepada Non Lembaga Keuangan. Hasil penetapan limit fasilitas *Credit Line* kepada *Counterparty* didasarkan atas analisa aspek legal, rating perusahaan, aspek manajemen, aspek keuangan, aspek industri, aspek pemasaran, dan aspek agunan. Manajemen Risiko Pasar juga melakukan pengawasan transaksi terhadap limit fasilitas *Credit Line* kepada Non Lembaga Keuangan secara harian.

Struktur Manajemen Risiko

Tata kelola risiko Bank yang berlandaskan prinsip GCG terwujud dari terlibatnya seluruh organ Bank dalam pengelolaan manajemen risiko. Hal ini dapat dilihat dari susunan organisasi manajemen risiko Bank. Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab untuk memastikan penerapan Manajemen Risiko telah memadai sesuai dengan karakteristik, kompleksitas dan profil risiko Bank. Dewan Komisaris dan Direksi berperan aktif pada proses manajemen risiko dalam rangka memitigasi risiko Bank melalui Kualitas Penerapan Manajemen Risiko yang meliputi tata kelola risiko, kerangka manajemen risiko, proses manajemen risiko, kecukupan sumber daya manusia, dan kecukupan sistem informasi manajemen risiko, serta kecukupan sistem pengendalian risiko.

46. RISK MANAGEMENT (continued)

In order to improve and optimize services to the public, especially in the Commercial and Corporate Loan business, as well as to increase Bank revenue through the provision of Credit Line facilities to Non-Financial Institutions. In the process of granting Credit Line Facilities for Non-Financial Institutions, the credit risk management unit has been involved, starting from data collection to the decision process for granting Credit Line Facilities for Non-Financial Institutions. The results of the limit determination of Credit Line facilities to Counterparties are based on analysis of legal aspects, company ratings, management aspects, financial aspects, industrial aspects, marketing aspects, and collateral aspects. Market Risk Management also monitors transactions on Credit Line facility limits for Non-Financial Institutions on a daily basis.

Risk Management Structure

The Bank's risk governance, which is based on the principles of GCG, involves the entire Bank in managing risks. This can be seen in the composition of the Bank's risk management organizational structure. The Board of Commissioners (BOC) and Board of Directors (BOD) are responsible for ensuring the proper implementation of risk management in accordance to the characteristics, complexity and risk profile of the Bank. The BOC and BOD play an active role in the risk management process in order to mitigate the risk of the Bank through Quality of Risk Management Implementation which covers risk governance, risk management framework, risk management process, the adequacy of human resources and risk management information systems, as well as the adequacy of risk management systems.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

46. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Struktur Manajemen Risiko (lanjutan)

Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko bertugas dan bertanggung jawab dalam memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dengan melakukan evaluasi atas pedoman kebijakan manajemen risiko Bank (Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Strategik, Risiko Kepatuhan dan Risiko Reputasi), melakukan evaluasi kesesuaian antara pedoman kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaannya dan melakukan pemantauan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Pemantau Risiko mengadakan rapat dengan Enterprise Risk Management Division secara berkala membahas isu-isu terkini, Profil Risiko Triwulanan, Tingkat Kesehatan Bank, *Recovery Plan* dan hal-hal yang terkait dengan manajemen risiko Bank termasuk ikut mereview Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko yang didalamnya terdapat *Risk Appetite* dan *Risk Tolerance* Bank.

Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko (KMR) berperan aktif dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan terhadap risiko yang melekat pada kebijakan yang akan ditetapkan Direksi maupun memberikan evaluasi terhadap ketentuan-ketentuan yang dinilai kurang sesuai dengan perkembangan terkini dan perlu dilakukan penyesuaian. KMR terlibat secara aktif dalam melakukan penilaian risiko yang melekat pada setiap produk dan/atau jasa/aktivitas baru sehingga Bank dapat melakukan langkah-langkah mitigasi yang diperlukan. Selain itu apabila dipandang perlu, KMR dapat melakukan evaluasi terhadap Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko (PKMR).

Satuan Kerja Manajemen Risiko

Enterprise Risk Management Division (ERMD) merupakan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) pada Bank, dipimpin oleh seorang Kepala Divisi yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur *Enterprise Risk Management, Big Data & Analytics*. Struktur organisasi *Enterprise Risk Management Division* terdiri dari *Market Risk Management Department*, *Credit Portfolio Risk Management Department*, *Operational Risk Management Department*, *Integrated Risk Management Department* dan *Quality Assurance & Control*.

46. RISK MANAGEMENT (continued)

Risk Management Structure (continued)

Risk Monitoring Committee

The Risk Monitoring Committee is responsible for providing recommendations to the Board of Commissioners by evaluating the Bank's risk management policy guidelines (Credit Risk, Market Risk, Liquidity Risk, Operational Risk, Strategic Risk, Compliance Risk and Reputational Risk), evaluating according to the policy guidelines and monitoring the duties of Risk Management Committee. In carrying out its duties, the Risk Monitoring Committee with the Enterprise Risk Management Division regularly discuss issues about Risk Profile, Bank Soundness Level, Recovery Plan and other matters related to Bank risk management including reviewing the Risk Management Policy Guidelines in which there are Risk Appetite and Risk Tolerance Bank.

Risk Management Committee

The Bank's Risk Management Committee (RMC) is actively involved in providing advice on the inherent risks associated to new policies to be established by the BOD and providing evaluation to the regulations that are considered to be outdated and require updating. The RMC is also actively involved in conducting risk measurement of the risks associated to new products and/or services to enable the Bank to take the necessary mitigating actions. The RMC may evaluate the Risk Management Policy Guidelines, if necessary.

Risk Management Division

Enterprise Risk Management Division (ERMD) is a Risk Management Working Unit (RMWU) at the Bank, led by a Division Head that is responsible directly to the Enterprise Risk Management, Big Data & Analytics Director. The organizational structure of the ERMD consists of the Market Risk Management Department, Credit Portfolio Risk Management Department, Operational Risk Management Department, Integrated Risk Management Department and Quality Assurance & Control.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

46. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Struktur Manajemen Risiko (lanjutan)

Market Risk Management Department berfungsi untuk melakukan pengelolaan Risiko Pasar dan Risiko Likuiditas. Fungsi *Credit Risk Management Department* melakukan pengelolaan Risiko Kredit, *Operational Risk Management Department* berfungsi mengelola Risiko Operasional, Risiko Kepatuhan, Risiko Reputasi dan Risiko Hukum sedangkan *Integrated Risk Department* berfungsi mengelola Risiko Strategik. Setiap *Departement Head* dibantu oleh Unit *Policy & Procedure* dan Unit *Assessment & Measurement*.

Bank telah memiliki panduan kebijakan di bidang manajemen risiko yaitu Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko (PKMR) di mana di dalamnya telah mencakup ketentuan-ketentuan minimal yang disyaratkan di dalam Peraturan Bank Indonesia. Pengkajian ulang terhadap kebijakan internal juga dilakukan agar sesuai dengan ketentuan terkini dari regulator dengan melakukan *gap analysis* serta mengakomodasi *best practices* yang lazim digunakan untuk meningkatkan kualitas penerapan manajemen risiko.

Kebijakan dan Prosedur Pengelolaan Manajemen Risiko

Sistem informasi manajemen risiko pada tahap awal difokuskan pada pengumpulan dan perbaikan *database* risiko yang diharapkan dapat dikembangkan dan diaplikasikan ke dalam sistem teknologi informasi secara bertahap agar proses pengukuran risiko dan pemantauan risiko dapat dilakukan secara terintegrasi dan dapat disajikan secara tepat waktu.

Profil Risiko

Sesuai dengan POJK No. 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 dan SE OJK No. 34/SEOJK.03/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, ERMD menyampaikan laporan profil risiko kepada Otoritas Jasa Keuangan per triwulan yang memuat tentang eksposur risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko hukum, risiko reputasi dan risiko strategik. Selanjutnya berdasarkan POJK No. 4/POJK.03/2016 tanggal 26 Januari 2016 dan SEOJK No.14/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, meliputi penilaian faktor profil risiko yang meliputi penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam aktivitas operasional Bank.

46. RISK MANAGEMENT (continued)

Risk Management Structure (continued)

Market Risk Management Department is responsible for managing market risk and liquidity risk. *Credit Risk Management Department* is responsible for credit risk management, while *Operational Risk Management Department* is responsible for managing operational risk, compliance risk, reputational risk and legal risk and *Integrated Risk Management* responsible for strategik risk. The *Department Head* is assisted by *Policy & Procedure Unit* and *Assessment & Measurement Unit*.

The Bank's risk management policies are formalized in the RMPM. RMPM sets out the minimum requirements based on Bank Indonesia regulations. A regular review is conducted on internal policies to comply with the prevailing regulations from regulatory bodies. Gap analysis are performed and best practices are applied to enhance the quality of the risk management implementation.

Risk Management Policies and Procedures

The Bank also performs risk management on information systems which focuses on risk database collection and improvement. The data is gradually developed and applied in the information technology system so that risk measurement and monitoring can be integrated into the Bank's risk management on a timely basis.

Risk Profile

In accordance with POJK No.18/POJK.03/2016 dated March 16, 2016 and SE OJK No. 34/SEOJK.03/2016 dated September 1, 2016 regarding on Risk Management for Commercial Banks, ERMD submits on a quarterly basis a risk profile report to the Financial Services Authority, which contains exposure to credit risk, market risk, liquidity risk, operational risk, compliance risk, legal risk, reputational risk and strategic risk. Furthermore, based on POJK No. 4/POJK.03/2016 dated January 26, 2016 and SEOJK No. 14/SEOJK.03/2017 dated March 17, 2017 regarding a Bank's health level, the assessment of the risk profile will cover the inherent risk and quality of risk management implementation through the operational activities of the Bank.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

46. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Profil Risiko (lanjutan)

Secara umum, sesuai dengan penilaian secara *self assessment* Profil Risiko Bank triwulan IV tahun 2023 diupayakan tetap berada pada tingkat *Low to Moderate* yang tercermin dari tingkat risiko inherent moderate dan tingkat kualitas penerapan manajemen risiko dengan peringkat *satisfactory*. Risiko Inheren meliputi strategi bisnis, karakteristik bisnis, kompleksitas produk dan aktivitas Bank, industri dimana Bank melakukan kegiatan usaha, serta kondisi makro ekonomi. Kualitas Penerapan Manajemen Risiko meliputi tata kelola risiko, kerangka manajemen risiko, proses manajemen risiko, kecukupan sumber daya manusia, dan kecukupan sistem informasi manajemen risiko, serta kecukupan sistem pengendalian risiko.

Risiko Kredit

Pengelolaan risiko kredit merupakan bagian dari pengelolaan manajemen risiko secara keseluruhan, yang mengacu pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/25/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No.5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum dimana Risiko Kredit merupakan risiko yang terjadi akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban mereka kepada Bank.

Bank secara teratur meninjau dan memperbarui Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko serta Pedoman Kebijakan Kredit dan Pembiayaan.

Eksposur Risiko Kredit dipantau sejak proses pemberian kredit sampai dengan jatuh tempo kredit. Pemantauan risiko diantaranya adalah memastikan kepatuhan dengan persyaratan kredit, kecukupan agunan dan penanganan kredit bermasalah.

Pemantauan risiko secara reguler dilakukan oleh ERMD untuk memastikan bahwa unit kerja melakukan kegiatan kredit secara konsisten menerapkan ketentuan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai dengan batasan yang ditetapkan oleh Bank.

Langkah strategis lainnya dalam penerapan manajemen risiko kredit Bank adalah dengan melakukan penyebaran risiko kredit dan pengendalian konsentrasi kredit dengan meningkatkan portofolio kredit maupun pembiayaan di luar sektor perumahan (*non-housing related*).

46. RISK MANAGEMENT (continued)

Risk Profile (continued)

In general, in accordance with the self-assessment of the Bank's Risk Profile for the fourth quarter of 2023, it is strived to be at the Low to Moderate level, which is reflected in the moderate inherent risk level and satisfactory level of quality of risk management implementation. Inherent risks include business strategy, business characteristics, complexity of products and activities of the Bank, the industry in which the Bank conducts business, as well as macroeconomic conditions. The quality of risk management implementation covers risk governance, risk management framework, risk management process, the adequacy of human resources and risk management information systems, as well as the adequacy of the risk management system.

Credit Risk

Credit risk management is part of the overall risk management, which is defined in Bank Indonesia Regulation (PBI) No. 11/25/PBI/2009 dated July 1, 2009 regarding the Amendment to Bank Indonesia Regulation No. 5/8/PBI/2003 regarding Risk Management Implementation for Commercial Banks, as the risk arising from the failure of debtors and/or other parties to fulfill their obligations to the Bank.

The Bank regularly reviews and updates the RMPM Guidelines as well as the Credit and Financing Manual Policy.

Credit risk exposure is monitored from the credit granting process until the maturity of the credit. Credit risk monitoring includes, among others, ensuring compliance with the terms of the loan, adequacy of collateral and handling of non-performing loans.

Regular risk monitoring is undertaken by ERMD to ensure that the business units carrying out credit activities are consistently implementing regulation and Standard Operating Procedures (SOP) based on the limits set by the Bank.

Another strategic step in the implementation of the Bank's credit risk management is to distribute credit risk and minimize credit concentration by increasing the loan portfolio as well as financing non-housing related sectors.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

46. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Kredit (lanjutan)

- (i) Analisa eksposur maksimum terhadap risiko kredit setelah memperhitungkan dampak agunan dan mitigasi risiko kredit lainnya:

Nilai tercatat dari aset keuangan Bank selain kredit yang diberikan menggambarkan eksposur maksimum atas risiko kredit.

Bank menetapkan jenis dan nilai agunan yang dijaminan sesuai skema kredit dan perkiraan tingkat risiko kredit dari *counterparty* sebagai *second way out* yang ditetapkan. Jenis dari agunan terdiri dari:

- a) *Physical collateral*, berupa tanah dan bangunan.
- b) *Financial collateral*, berupa simpanan (tabungan, giro dan deposito), surat berharga, dan lain-lain.
- c) Lainnya berupa garansi, lembaga penjamin, dan lain-lain.

Pemberian kredit yang dilaksanakan oleh Bank diatur dalam kebijakan dan prosedur perkreditan dimana untuk setiap jenis atau skema kredit telah ditentukan agunan minimal yang harus dipenuhi.

Untuk segmen kredit komersial yang umumnya merupakan kredit yasa griya, sesuai ketentuan perkreditan wajib dijamin oleh agunan yang memadai. Agunan dapat berupa *physical collateral*, *financial collateral* atau lainnya berupa tagihan usaha atau garansi. Untuk seluruh agunan khususnya *physical collateral* akan dilakukan retaksasi dimana nilai likuidasi atas agunan tersebut yang akan dipergunakan dalam menentukan kecukupan nilai agunan (*coverage ratio*).

Selain aspek agunan untuk meminimalkan risiko kredit, pemberian kredit oleh Bank selalu dilakukan berdasarkan evaluasi dan analisa kelayakan sehingga kemampuan pengembalian kredit (*first way out*) dapat dipastikan.

Adanya keharusan bagi debitur untuk memenuhi agunan yang dipersyaratkan, evaluasi atas kelayakan kredit, pengikatan kredit secara legal dan prosedur *pre screening* akan menurunkan *credit risk* eksposur Bank ke tingkat yang layak dan dapat diterima.

46. RISK MANAGEMENT (continued)

Credit Risk (continued)

- (i) Analysis on maximum exposures against credit risks considering the impact of collateral and other credit risks mitigation:

The carrying value of the Bank's financial assets other than loans represents its maximum exposure to credit risk.

The Bank determined the type and value of collateral according to the loan scheme as well as estimated credit risk level from the counterparty as a determined second way out. The types of collateral are as follows:

- a) *Physical collateral*, such as land and buildings.
- b) *Financial collateral*, such as third party funds (saving deposits, demand deposits and time deposits), securities, etc.
- c) Others, such as guarantees, guarantee institution, etc.

The loan granting conducted by the Bank is stipulated in the loan policy and procedure in which every loan type or scheme has minimum determinable collaterals that should be fulfilled.

For commercial loans segment which generally represent yasa griya loan, according to the loan policy has to be collateralized adequately. The collaterals can be physical collateral, financial collateral or others such as accounts receivable or guarantees. All collaterals particularly for physical collateral will be assessed in which the collateral's liquidation value will be used in determining the coverage ratio.

In addition to collateral aspect to minimize credit risk, loan granting is conducted based on evaluation and feasibility analysis so that the loan repayment ability (*first way out*) can be ascertained.

The necessity for debtors to comply with collaterals requirement, loan feasibility evaluation, notarial agreement and pre screening procedures will decrease the Bank's credit risk exposure to the acceptable level.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

46. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Kredit (lanjutan)

(ii) Konsentrasi risiko aset keuangan dengan eksposur risiko kredit

a) Sektor geografis

Tabel berikut menggambarkan rincian eksposur kredit Bank pada nilai tercatat, yang dikategorikan berdasarkan area geografis pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022. Untuk tabel ini, Bank telah mengalokasikan eksposur area berdasarkan wilayah geografis tempat mereka beroperasi.

46. RISK MANAGEMENT (continued)

Credit Risk (continued)

(ii) Concentration of risks of financial assets with credit risk exposure

a) Geographical sectors

The following tables provide details of the Bank's credit exposures at their carrying amounts, as categorized by geographical region as of December 31, 2023 and 2022. For these tables, the Bank has allocated exposures to the regions based on the geographical area where activities are undertaken.

31 Desember/December 31, 2023							
	Kantor Pusat/ Head Office	Jabodetabek	Jawa selain Jabodetabek/ Java other than Jabodetabek	Sumatera	Lain-lain/ Others**)	Total	
Giro pada Bank Indonesia	18.145.761	-	-	-	-	18.145.761	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	2.202.683	-	403	288	24	2.203.398	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	30.561.122	-	-	-	-	30.561.122	Placements with Bank Indonesia and other banks
Efek-efek	4.661.195	644.080	598	-	-	5.305.873	Securities
Obligasi Pemerintah	35.893.929	-	-	-	-	35.893.929	Government bonds
Tagihan akseptasi	-	544.567	-	-	-	544.567	Acceptance receivable
Tagihan derivatif	32.176	-	-	-	-	32.176	Derivative receivable
Kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah	-	-	-	-	-	-	Loans and sharia financing/receivables
Konsumer	-	-	-	-	-	-	Consumer
Pemilikan rumah	-	108.384.592	66.369.601	40.751.732	42.564.956	258.070.881	Housing loan
Non-kepemilikan rumah	-	3.953.716	4.334.006	1.612.985	3.105.874	13.006.581	Non-housing loan
Modal kerja	-	26.289.070	6.911.050	2.402.162	2.357.847	37.960.129	Working capital
Investasi	-	13.025.928	1.571.579	688.670	245.830	15.532.007	Investment
Sindikasi	-	7.150.361	-	-	-	7.150.361	Syndicated
Direksi dan karyawan:	-	-	-	-	-	-	Director and Employees
- Pihak ketiga	-	815.126	518.583	253.279	306.644	1.893.632	Third party -
- Pihak berelasi	-	44.440	23.270	5.808	11.032	84.550	Related party -
Bunga yang masih akan diterima	535.488	5.711.328	2.935.706	1.061.214	1.282.951	11.526.687	Interest receivable
Aset lain-lain ^{*)}	1.495.389	363.395	8.930	2.068	3.714	1.873.496	Other assets ^{*)}
Total kotor	93.527.743	166.926.603	82.673.726	46.778.206	49.878.872	439.785.150	Total gross
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	-	-	-	-	(15.640.547)	Allowances for impairment losses
Neto						424.144.603	Net

^{*)} Terdiri atas tagihan kepada pihak ketiga
^{**)} Lain-lain terdiri atas Kalimantan, Sulawesi, Bali, Maluku dan Papua.

^{*)} Consists of third parties receivables
^{**)} Others consists of Kalimantan, Sulawesi, Bali, Maluku and Papua.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

46. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Kredit (lanjutan)

(ii) Konsentrasi risiko aset keuangan dengan eksposur risiko kredit (lanjutan)

a) Sektor geografis (lanjutan)

46. RISK MANAGEMENT (continued)

Credit Risk (continued)

(ii) Concentration of risks of financial assets with credit risk exposure (continued)

a) Geographical sectors (continued)

31 Desember/December 31, 2022

	Kantor Pusat/ Head Office	Jabodetabek	Jawa selain Jabodetabek/ Java other than Jabodetabek	Sumatera	Lain-lain/ Others**)	Total	
Giro pada Bank Indonesia	25.416.941	-	-	-	-	25.416.941	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	1.470.723	-	240	1.271	23	1.472.257	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	12.975.955	-	-	-	-	12.975.955	Placements with Bank Indonesia and other banks
Efek-efek	1.723.168	-	-	-	-	1.723.168	Securities
Obligasi Pemerintah	51.964.973	-	-	-	-	51.964.973	Government bonds
Efek - efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	1.434.190	-	-	-	-	1.434.190	Securities purchased under agreement to resell
Tagihan akseptasi	-	410.219	10.343	-	-	420.562	Acceptance receivable
Tagihan derivatif	103.939	-	-	-	-	103.939	Derivative receivable
Kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah	-	-	-	-	-	-	Loans and sharia financing/receivables
Konsumer	-	-	-	-	-	-	Consumer
Pemilikan rumah	-	98.728.648	59.465.684	37.405.974	38.286.748	233.887.054	Housing loan
Non-kepemilikan rumah	-	3.415.964	3.965.796	1.400.018	2.907.880	11.689.658	Non-housing loan
Modal kerja	-	22.394.510	7.732.094	2.044.470	2.284.609	34.455.683	Working capital
Investasi	-	9.556.832	1.246.509	636.549	203.732	11.643.622	Investment
Sindikasi	-	4.504.244	-	-	-	4.504.244	Syndicated
Direksi dan karyawan:	-	-	-	-	-	-	Director and Employees
- Pihak ketiga	-	874.100	538.776	273.637	321.567	2.008.080	Third party -
- Pihak berelasi	-	52.022	22.575	6.090	12.676	93.363	Related party -
Bunga yang masih akan diterima	556.024	5.216.864	2.719.508	993.220	1.264.686	10.750.302	Interest receivable
Aset lain-lain ^{*)}	948.131	78.478	8.250	2.090	3.099	1.040.048	Other assets ^{*)}
Total kotor	96.594.044	145.231.881	75.709.775	42.763.319	45.285.020	405.584.039	Total gross
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	-	-	-	-	(15.679.205)	Allowances for impairment losses
Neto						389.904.834	Net

*) Terdiri atas tagihan kepada pihak ketiga

**) Lain-lain terdiri atas Kalimantan, Sulawesi, Bali, Maluku dan Papua.

*) Consists of third parties receivables

**) Others consists of Kalimantan, Sulawesi, Bali, Maluku and Papua.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

46. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Kredit (lanjutan)

- (ii) Konsentrasi risiko aset keuangan dengan eksposur risiko kredit (lanjutan)

Eksposur risiko kredit atas rekening administratif pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

31 Desember/December 31, 2023

	Kantor Pusat/ Head Office	Jabodetabek	Jawa selain Jabodetabek/ Java other than Jabodetabek	Sumatera	Lain-lain/ Others ^{*)}	Total
Fasilitas kredit yang belum ditarik ^{**)}	-	34.511	39.265	46.294	7.013	127.083
Garansi yang diterbitkan Irrevocable L/C	-	1.189.111	1.176.639	88.872	124.553	2.579.175
Yang masih berjalan	-	19.393	-	713	-	20.106
Total	-	1.243.015	1.215.904	135.879	131.566	2.726.364

Unused loan facilities^{**)}
Guarantees issued
Outstanding
irrevocable L/Cs

Total

31 Desember/December 31, 2022

	Kantor Pusat/ Head Office	Jabodetabek	Jawa selain Jabodetabek/ Java other than Jabodetabek	Sumatera	Lain-lain/ Others ^{*)}	Total
Fasilitas kredit yang belum ditarik ^{**)}	-	15.819	36.774	25.471	2.064	80.128
Garansi yang diterbitkan Irrevocable L/C	-	718.932	190.123	623	38.817	948.495
Yang masih berjalan	-	173.743	47.741	-	-	221.484
Total	-	908.494	274.638	26.094	40.881	1.250.107

Unused loan facilities^{**)}
Guarantees issued
Outstanding
irrevocable L/Cs

Total

^{*)} Lain-lain terdiri atas Kalimantan, Sulawesi, Bali, Maluku dan Papua
^{**)} Hanya fasilitas kredit committed yang belum ditarik

^{*)} Others consists of Kalimantan, Sulawesi, Bali, Maluku and Papua
^{**)} Only for committed unused loan facility

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

46. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Kredit (lanjutan)

(ii) Konsentrasi risiko aset keuangan dengan eksposur risiko kredit (lanjutan)

b) Sektor industri

Tabel berikut ini menggambarkan rincian eksposur kredit Bank pada nilai tercatat (tanpa memperhitungkan agunan atau pendukung kredit lainnya), yang dikategorikan berdasarkan sektor industri pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022:

46. RISK MANAGEMENT (continued)

Credit Risk (continued)

(ii) Concentration of risks of financial assets with credit risk exposure (continued)

b) Industry sectors

The following tables provide the details of the Bank's credit exposure at carrying amounts (without taking into account any collateral held or other credit enhancements), categorized based on industry sectors as of December 31, 2023 and 2022:

31 Desember/December 31, 2023							
	Pemerintah (termasuk Bank Indonesia)/ Government (including Bank Indonesia)	Bank/ Banks	Lembaga keuangan bukan bank/ Non-bank financial institutions	Perusahaan lainnya/ Other companies**)	Perseorangan/ Individuals	Total	
Giro pada Bank Indonesia	18.145.761	-	-	-	-	18.145.761	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	-	2.203.398	-	-	-	2.203.398	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	12.148.687	18.412.435	-	-	-	30.561.122	Placements with Bank Indonesia and other banks
Efek-efek	501.570	163.395	1.989.553	2.651.355	-	5.305.873	Securities
Obligasi Pemerintah	35.893.929	-	-	-	-	35.893.929	Government bonds
Tagihan Akseptasi	-	-	-	544.567	-	544.567	Acceptance Receivable
Tagihan Derivatif	-	32.176	-	-	-	32.176	Derivative Receivable
Kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah	7.558.101	1.325.728	1.407.154	48.195.548	275.211.610	333.698.141	Loans and sharia financing/receivables
Bunga yang masih akan diterima	709.162	4.651	7.818	2.120.280	8.684.776	11.526.687	Interest receivable
Aset lain-lain*)	574.025	31.022	75.821	876.238	316.390	1.873.496	Other assets*)
Total kotor	75.531.235	22.172.805	3.480.346	54.387.988	284.212.776	439.785.150	Total gross
Cadangan kerugian penurunan nilai						(15.640.547)	Allowances for impairment losses
Neto						424.144.603	Net

*) Terdiri atas tagihan kepada pihak ketiga.

**) Termasuk perusahaan yang bergerak di industri perumahan, konstruksi, manufaktur, transportasi, pergudangan dan komunikasi, perdagangan, pertanian, pertambangan dan industri lainnya.

*) Consists of third party receivables.

**) Includes other companies under real estate, construction, manufacturing, transportation, warehousing and communication, trading, farming, mining and other industries.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

46. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Kredit (lanjutan)

(ii) Konsentrasi risiko aset keuangan dengan eksposur risiko kredit (lanjutan)

b) Sektor industri (lanjutan)

Tabel berikut ini menggambarkan rincian eksposur kredit Bank pada nilai tercatat (tanpa memperhitungkan agunan atau pendukung kredit lainnya), yang dikategorikan berdasarkan sektor industri pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022: (lanjutan)

46. RISK MANAGEMENT (continued)

Credit Risk (continued)

(ii) Concentration of risks of financial assets with credit risk exposure (continued)

b) Industry sectors (continued)

The following tables provide the details of the Bank's credit exposure at carrying amounts (without taking into account any collateral held or other credit enhancements), categorized based on industry sectors as of December 31, 2023 and 2022: (continued)

	31 Desember/December 31, 2022						
	Pemerintah (termasuk Bank Indonesia)/ Government (including Bank Indonesia)	Bank/ Banks	Lembaga keuangan bukan bank/ Non-bank financial institutions	Perusahaan lainnya/ Other companies**)	Perseorangan/ Individuals	Total	
Giro pada Bank Indonesia	25.416.941	-	-	-	-	25.416.941	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	-	1.472.257	-	-	-	1.472.257	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	12.575.894	400.061	-	-	-	12.975.955	Placements with Bank Indonesia and other banks
Efek-efek	-	547.036	593.031	583.101	-	1.723.168	Securities
Obligasi Pemerintah	51.964.973	-	-	-	-	51.964.973	Government bonds
Efek - efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	1.434.190	-	-	-	-	1.434.190	Securities purchased under agreement to resell
Tagihan Akseptasi	-	-	-	420.562	-	420.562	Acceptance Receivable
Tagihan Derivatif	-	103.939	-	-	-	103.939	Derivative Receivable
Kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah	4.516.550	40.261	810.586	44.381.293	248.533.014	298.281.704	Loans and sharia financing/receivables
Bunga yang masih akan diterima	545.988	31.175	4.023	2.427.021	7.742.095	10.750.302	Interest receivable
Aset lain-lain*)	5.733	488.071	-	403.022	143.222	1.040.048	Other assets*)
Total kotor	96.460.269	3.082.800	1.407.640	48.214.999	256.418.331	405.584.039	Total gross
Cadangan kerugian penurunan nilai						(15.679.205)	Allowances for impairment losses
Neto						389.904.834	Net

*) Terdiri atas tagihan kepada pihak ketiga.

**) Termasuk perusahaan yang bergerak di industri perumahan, konstruksi, manufaktur, transportasi, pergudangan dan komunikasi, perdagangan, pertanian, pertambangan dan industri lainnya.

*) Consists of third party receivables.

**) Includes other companies under real estate, construction, manufacturing, transportation, warehousing and communication, trading, farming, mining and other industries.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

46. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Kredit (lanjutan)

- (ii) Konsentrasi risiko aset keuangan dengan eksposur risiko kredit (lanjutan)

b) Sektor industri (lanjutan)

Eksposur risiko kredit yang terkait dengan unsur rekening administratif adalah sebagai berikut pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022: (lanjutan)

46. RISK MANAGEMENT (continued)

Credit Risk (continued)

- (ii) Concentration of risks of financial assets with credit risk exposure (continued)

b) Industry sectors (continued)

Credit risk exposure relating to administrative account items as of December 31, 2023 and 2022, are as follows: (continued)

31 Desember/December 31, 2023							
	Pemerintah (termasuk Bank Indonesia)/ Government (including Bank Indonesia)	Bank/ Banks	Lembaga keuangan bukan bank/ Non-bank financial institutions	Perusahaan lainnya/ Other companies ^{*)}	Perseorangan/ Individuals	Total	
Fasilitas kredit							
yang belum ditarik ^{**)}	-	-	140	120.686	6.257	127.083	Unused loan facilities ^{**)}
Garansi yang diterbitkan	-	-	-	2.576.727	2.448	2.579.175	Guarantees issued
Irrevocable L/C							Outstanding
yang masih berjalan	-	-	-	20.106	-	20.106	irrevocable L/Cs
Total	-	-	140	2.717.519	8.705	2.726.364	Total

^{*)} Termasuk perusahaan yang bergerak di industri perumahan, konstruksi, manufaktur, transportasi, pergudangan dan komunikasi, perdagangan, pertanian, pertambangan dan industri lainnya.

^{**)} Hanya fasilitas kredit komitmen yang belum ditarik

^{*)} Includes other companies under real estate, construction, manufacturing, transportation, warehousing and communication, trading, farming, mining and other industries.

^{**)} Only for committed unused loan facility

31 Desember/December 31, 2022							
	Pemerintah (termasuk Bank Indonesia)/ Government (including Bank Indonesia)	Bank/ Banks	Lembaga keuangan bukan bank/ Non-bank financial institutions	Perusahaan lainnya/ Other companies ^{*)}	Perseorangan/ Individuals	Total	
Fasilitas kredit							
yang belum ditarik ^{**)}	-	-	-	77.942	2.186	80.128	Unused loan facilities ^{**)}
Garansi yang diterbitkan	-	-	-	946.635	1.860	948.495	Guarantees issued
Irrevocable L/C							Outstanding
yang masih berjalan	-	-	-	221.484	-	221.484	irrevocable L/Cs
Total	-	-	-	1.246.061	4.046	1.250.107	Total

^{*)} Termasuk perusahaan yang bergerak di industri perumahan, konstruksi, manufaktur, transportasi, pergudangan dan komunikasi, perdagangan, pertanian, pertambangan dan industri lainnya.

^{**)} Hanya fasilitas kredit komitmen yang belum ditarik

^{*)} Includes other companies under real estate, construction, manufacturing, transportation, warehousing and communication, trading, farming, mining and other industries.

^{**)} Only for committed unused loan facility

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

46. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Kredit (lanjutan)

(iii) Informasi mengenai aset keuangan yang mengalami dan tidak mengalami penurunan nilai

1. Giro pada Bank Lain

	31 Desember/December 31, 2023			
	Tidak mengalami penurunan nilai/ Not Impaired	Mengalami penurunan nilai/ Impaired ^{*)}	Total	
Rupiah	234.046	-	234.046	Rupiah
Mata Uang Asing	1.967.574	1.778	1.969.352	Foreign currencies
Total	2.201.620	1.778	2.203.398	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai			(1.804)	Allowance for impairment losses
Neto			2.201.594	Net

^{*)} Kolektibilitas 3, 4 dan 5

^{*)} Collectibility 3, 4 and 5

	31 Desember/December 31, 2022			
	Tidak mengalami penurunan nilai/ Not Impaired	Mengalami penurunan nilai/ Impaired ^{*)}	Total	
Rupiah	540.052	-	540.052	Rupiah
Mata Uang Asing	930.474	1.731	932.205	Foreign currencies
Total	1.470.526	1.731	1.472.257	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai			(1.747)	Allowance for impairment losses
Neto			1.470.510	Net

^{*)} Kolektibilitas 3, 4 dan 5

^{*)} Collectibility 3, 4 and 5

2. Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain.

Per 31 Desember 2023 dan 2022, aset keuangan ini tidak mengalami penurunan nilai secara individual maupun kolektif.

2. Placements with Bank Indonesia and other banks.

As of December 31, 2023 and 2022, these financial assets are not impaired individually as well as collectively.

3. Efek-efek

	31 Desember/December 31, 2023			
	Tidak mengalami penurunan nilai/ Not Impaired	Mengalami penurunan nilai/ Impaired ^{*)}	Total	
Reksadana	1.372.968	-	1.372.968	Mutual Funds
Obligasi	2.046.215	-	2.046.215	Bonds
Medium Term Notes	200.000	-	200.000	Medium Term Notes
Efek Beragunan Aset	540.443	-	540.443	Asset-Backed Securities
SKBDN	644.677	-	644.677	SKBDN
SRBI	194.060	-	194.060	SRBI
SVBI	307.510	-	307.510	SVBI
Total	5.305.873	-	5.305.873	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai			(22.903)	Allowance for impairment losses
Neto			5.282.970	Net

^{*)} Kolektibilitas 3, 4 dan 5

^{*)} Collectibility 3, 4 and 5

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

46. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Kredit (lanjutan)

(iii) Informasi mengenai aset keuangan yang mengalami dan tidak mengalami penurunan nilai (lanjutan)

3. Efek-efek (lanjutan)

	31 Desember/December 31, 2022		
	Tidak mengalami penurunan nilai/ Not Impaired	Mengalami penurunan nilai/ Impaired*)	Total
Reksadana	401.416	-	401.416
Obligasi	709.711	2.000	711.711
Medium Term Notes	103.085	-	103.085
Efek Beragunan Aset	492.415	-	492.415
SKBDN	14.541	-	14.541
Total	1.721.168	2.000	1.723.168
Cadangan kerugian penurunan nilai			(2.399)
Neto			1.720.769

*) Kolektibilitas 3, 4 dan 5

4. Rekening administratif

Per 31 Desember 2023 dan 2022, rekening administratif mengalami penurunan nilai masing-masing sebesar Rp3.580 dan Rp4.719.

5. Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali

Per 31 Desember 2023 dan 2022, efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali tidak mengalami penurunan nilai.

6. Tagihan Akseptasi

Per 31 Desember 2023 dan 2022, tagihan akseptasi tidak mengalami penurunan nilai.

7. Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah

Per 31 Desember 2023 dan 2022, aset keuangan ini mengalami penurunan nilai secara individual maupun kolektif sesuai ketentuan dalam PSAK No. 71 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK).

46. RISK MANAGEMENT (continued)

Credit Risk (continued)

(iii) Information about impaired and not impaired financial assets (continued)

3. Securities (continued)

		Mutual Funds
		Bonds
		Medium Term Notes
		Asset-Backed Securities
		SKBDN
Total	1.723.168	Total
	(2.399)	Allowance for impairment losses
Neto	1.720.769	Net

*) Collectibility 3, 4 and 5

4. Administrative account

As of December 31, 2023 and 2022, administrative account which are impaired amounting to Rp3,580 and Rp4,719, respectively.

5. Securities Purchased Under Agreement to Resell

As of December 31, 2023 and 2022, securities purchased under agreement to resell are not impaired.

6. Acceptance Receivable

As of December 31, 2023 and 2022, acceptance receivable are not impaired.

7. Loans and sharia financing/receivables

As of December 31, 2023 and 2022, these financial assets are impaired calculated by individual and collective impairment according to SFAS No. 71 and Financial Service Authority Regulations (POJK).

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

46. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Kredit (lanjutan)

- (iv) Tabel di bawah menunjukkan kualitas aset keuangan berdasarkan golongan aset untuk semua aset keuangan yang mempunyai risiko kredit (diluar cadangan kerugian penurunan nilai bruto):

46. RISK MANAGEMENT (continued)

Credit Risk (continued)

- (iv) The tables below shows the quality of financial assets by class of assets for all financial assets with credit risk (gross of allowance for impairment losses):

31 Desember/December 31, 2023						
	Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ neither past due nor impaired	Tingkat tinggi/ High Grade ^{*)}	Tingkat standar/ Standard grade ^{**)}	Jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ Past due but not impaired	Mengalami penurunan nilai/ Impaired ^{***)}	Total
Efek-efek						Securities
Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi	1.042.013	-	-	-	-	Fair value through profit -or-loss
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	1.928.336	-	-	-	-	Financial assets held at fair value through other comprehensive income
Diukur pada biaya perolehan amortisasi	2.335.524	-	-	-	-	Amortized cost
Obligasi pemerintah						Government bonds
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	3.796.440	-	-	-	-	Fair value through profit -or-loss
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	12.511.991	-	-	-	-	Financial assets held at fair value through other comprehensive income
Diukur pada biaya perolehan amortisasi	19.585.498	-	-	-	-	Amortized cost
Lain-lain						Others
Giro pada bank Indonesia	18.145.761	-	-	-	-	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	2.201.620	-	-	-	1.778	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	30.561.122	-	-	-	-	Placements with Bank Indonesia and other banks
Tagihan Akseptasi	544.567	-	-	-	-	Acceptance Receivable
Tagihan Derivatif	32.176	-	-	-	-	Derivative Receivable
Kredit yang diberikan dan piutang/ pembiayaan syariah						Loans and sharia financing/ receivables
Konsumer						Consumer
Pemilikan rumah	101.324.869	135.794.934	16.884.060	4.067.018	258.070.881	Housing loan
Non kepemilikan rumah	1.808.716	10.021.561	805.808	370.496	13.006.581	Non-housing loan
Modal kerja	3.213.787	22.252.701	711.771	11.781.870	37.960.129	Working capital
Investasi	123.007	9.606.196	44.474	5.758.330	15.532.007	Investment
Sindikasi	46.911	7.103.450	-	-	7.150.361	Syndicated
Direksi dan karyawan						Directors and employees
- Pihak ketiga	1.131.978	729.456	7.472	24.726	1.893.632	Third parties -
- Pihak yang berelasi	53.307	31.243	-	-	84.550	Related parties -
Bunga yang masih akan diterima	11.526.687	-	-	-	11.526.687	Interests receivable
Aset lain-lain ³⁾	1.873.496	-	-	-	1.873.496	Other assets ³⁾
Total	213.787.806	185.539.541	18.453.585	22.004.218	439.785.150	Total
Cadangan kerugian nilai					(15.640.547)	Allowance for impairment losses
Neto					424.144.603	Net

*) Terdiri atas tagihan kepada pihak ketiga

**) Tidak diaudit

***) Terdiri dari kolektibilitas 3, 4 dan 5 dan kredit yang cadangan kerugian penurunan nilainya dinilai secara individual, termasuk piutang/pembiayaan syariah dengan hari tunggakan diatas 270 hari

*) Consists of third party receivables

**) Unaudited

***) Consist of collectibility 3, 4, and 5 and credit with allowance for impairment losses individually assessed, including sharia financing/receivables with day past due 270 days

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

46. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Kredit (lanjutan)

(iv) Tabel di bawah menunjukkan kualitas aset keuangan berdasarkan golongan aset untuk semua aset keuangan yang mempunyai risiko kredit (diluar cadangan kerugian penurunan nilai bruto) (lanjutan):

46. RISK MANAGEMENT (continued)

Credit Risk (continued)

(iv) The tables below shows the quality of financial assets by class of assets for all financial assets with credit risk (gross of allowance for impairment losses) (continued):

31 Desember/December 31, 2022						
	Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ <i>neither past due nor impaired</i>	Tingkat tinggi/ <i>High Grade^{*)}</i>	Tingkat standar/ <i>Standard grade^{**)}</i>	Jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Past due but not impaired</i>	Mengalami penurunan nilai/ <i>Impaired^{***)}</i>	Total
Efek-efek						Securities
Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi	793.831	-	-	-	-	Fair value through profit -or-loss
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	655.293	-	-	-	-	Financial assets held at fair value through other comprehensive income
Diukur pada biaya perolehan amortisasi	272.044	-	-	-	2.000	Amortized cost
Obligasi pemerintah						Government bonds
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	19.591.199	-	-	-	-	Fair value through profit -or-loss
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	14.332.949	-	-	-	-	Financial assets held at fair value through other comprehensive income
Diukur pada biaya perolehan amortisasi	18.040.825	-	-	-	-	Amortized cost
Lain-lain						Others
Giro pada bank Indonesia	25.416.941	-	-	-	-	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	1.470.526	-	-	-	1.731	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	12.975.955	-	-	-	-	Placements with Bank Indonesia and other banks
Tagihan Akseptasi	420.562	-	-	-	-	Acceptance Receivable
Efek-efek yang Dibeli dengan janji dijual kembali	1.434.190	-	-	-	-	Securities purchased under agreement to resell
Tagihan Derivatif	103.939	-	-	-	-	Derivative Receivable
Kredit yang diberikan dan piutang/ pembiayaan syariah						Loans and sharia financing/ receivables
Konsumer						Consumer
Pemilikan rumah	106.290.471	109.503.902	15.481.718	2.610.963	233.887.054	Housing loan
Non kepemilikan rumah	2.560.043	8.260.912	650.143	218.560	11.689.658	Non-housing loan
Modal kerja	5.987.718	17.130.097	1.162.221	10.175.647	34.455.683	Working capital
Investasi	3.397.768	2.863.506	155.160	5.227.188	11.643.622	Investment
Sindikasi	2.055.846	2.448.398	-	-	4.504.244	Syndicated
Direksi dan karyawan						Directors and employees
- Pihak ketiga	1.331.455	653.854	10.891	11.880	2.008.080	Third parties -
- Pihak yang berelasi	72.047	20.553	655	108	93.363	Related parties -
Bunga yang masih akan diterima	10.750.302	-	-	-	10.750.302	Interests receivable
Aset lain-lain ³⁾	1.040.048	-	-	-	1.040.048	Other assets ³⁾
Total	228.993.952	140.881.222	17.460.788	18.248.077	405.584.039	Total
Cadangan kerugian nilai					(15.674.205)	Allowance for impairment losses
Neto					389.909.834	Net

*) Terdiri atas tagihan kepada pihak ketiga

**) Tidak diaudit

***) Terdiri dari kolektibilitas 3, 4 dan 5 dan kredit yang cadangan kerugian penurunan nilainya dinilai secara individual, termasuk piutang/pembiayaan syariah dengan hari tunggakan diatas 270 hari

*) Consists of third party receivables

**) Unaudited

***) Consist of collectibility 3, 4, and 5 and credit with allowance for impairment losses individually assessed, including sharia financing/receivables with day past due 270 days

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

46. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Kredit (lanjutan)

- (iv) Tabel di bawah menunjukkan kualitas aset keuangan berdasarkan golongan aset untuk semua aset keuangan yang mempunyai risiko kredit (cadangan kerugian penurunan nilai bruto) (lanjutan):

Kualitas kredit didefinisikan sebagai berikut:

Tingkat tinggi

- (a) Giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain yaitu giro atau penempatan pada institusi Pemerintah, transaksi dengan bank yang memiliki reputasi baik dengan tingkat kemungkinan gagal bayar atas kewajiban yang rendah.
- (b) Kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah, bunga yang masih akan diterima, dan tagihan kepada pihak ketiga yaitu debitur dengan riwayat pembayaran yang sangat baik dan tidak pernah menunggak sepanjang jangka waktu kredit.
- (c) Efek-efek dan obligasi pemerintah yaitu efek-efek yang dikeluarkan oleh Pemerintah RI, efek-efek dan obligasi yang termasuk dalam investment grade dengan rating minimal BBB- (Pefindo) atau Baa3 (Moody's).

Tingkat standar

- (a) Giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain yaitu giro atau penempatan pada bank lokal yang tidak terdaftar di bursa.
- (b) Kredit yang diberikan dan piutang/pembiayaan syariah, bunga yang masih akan diterima, dan tagihan kepada pihak ketiga yaitu debitur dengan riwayat pembayaran yang baik dan tidak pernah menunggak 90 hari atau lebih.
- (c) Efek-efek dan obligasi Pemerintah yaitu efek-efek dan obligasi dengan rating antara idBB+ sampai dengan idB (Pefindo) atau Ba1 sampai dengan B2 (Moody's).

46. RISK MANAGEMENT (continued)

Credit Risk (continued)

- (iv) The tables below shows the quality of financial assets by class of assets for all financial assets with credit risk (gross of allowance for impairment losses) (continued):

The credit quality is defined as follows:

High grade

- (a) Current accounts with Bank Indonesia, current accounts with other banks, placements with Bank Indonesia and other banks are current accounts or placements with government institution, transaction with reputable banks with low probability of default for its liabilities.
- (b) Loans and sharia financing/receivables, interests receivables and third party receivables are receivables from borrowers with very satisfactory track record of loan repayment and whose accounts did not turn past due during the term of the loan.
- (b) Securities and government bonds are Sovereign securities issued by government of RI, investment grade securities and bonds with a rating of at least BBB- (Pefindo) or Baa3 (Moody's).

Standard grade

- (a) Current accounts with Bank Indonesia, current accounts with other banks, placements with Bank Indonesia and other banks are current accounts or placements with the local banks not listed in the stock exchange.
- (b) Loans and sharia financing/receivables, interests receivables and third party receivables are receivables from borrowers who have an average track record of loan repayment and whose account did not turn past due for 90 days.
- (c) Securities and Government bonds with a rating between idBB+ to idB (Pefindo) or Ba1 to B2 (Moody's).

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

46. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Kredit (lanjutan)

- (v) Analisis umur pinjaman yang jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, sebagai berikut:

31 Desember/December 31, 2023					
	1 sampai 90 hari/ 1 to 90 days	91 sampai 120 hari/ 91 to 120 days	121 sampai 180 hari/ 121 to 180 days	180 sampai 270 hari/ 180 to 270 days	Total
Konsumer					
Pemilikan rumah	14.498.880	469.405	1.030.681	885.094	16.884.060
Non kepemilikan rumah	803.340	1.013	1.455	-	805.808
Modal kerja	711.771	-	-	-	711.771
Investasi	44.474	-	-	-	44.474
Direktur dan karyawan	7.472	-	-	-	7.472
Total	16.065.937	470.418	1.032.136	885.094	18.453.585
Cadangan kerugian nilai					(2.018.432)
Neto					16.435.153

Consumer
Housing Loan
Non housing loan
Working capital
Investment
Directors and employees

Total

Allowance for
impairment losses

Net

31 Desember/December 31, 2022					
	1 sampai 90 hari/ 1 to 90 days	91 sampai 120 hari/ 91 to 120 days	121 sampai 180 hari/ 121 to 180 days	180 sampai 270 hari/ 180 to 270 days	Total
Konsumer					
Pemilikan rumah	13.190.989	384.038	1.021.398	885.293	15.481.718
Non kepemilikan rumah	613.666	638	14.288	21.551	650.143
Modal kerja	719.359	-	12.786	430.076	1.162.221
Investasi	81.655	-	1.191	72.314	155.160
Direktur dan karyawan	9.513	-	851	1.182	11.546
Total	14.615.182	384.676	1.050.514	1.410.416	17.460.788
Cadangan kerugian nilai					(1.918.975)
Neto					15.541.813

Consumer
Housing Loan
Non housing loan
Working capital
Investment
Directors and employees

Total

Allowance for
impairment losses

Net

- (vi) Mutasi cadangan berdasarkan jenis kredit yang diberikan adalah sebagai berikut:

- (vi) *Movements in allowance for imparment losses by type of loans are as follows:*

31 Desember/December 31, 2023							
	Konsumsi/Konsumer						
	Pemilikan Rumah/ Housing Loan	Non-kepemilikan Rumah/ Non-Housing Loan	Modal Kerja/ Working Capital	Investasi/ Investment	Sindikasi/ Syndicated	Direksi dan Karyawan/ Directors and Employee	Total
Saldo Awal	6.364.735	264.372	7.490.645	1.526.614	15.493	13.064	15.674.923
Penyisihan kerugian penurunan nilai selama tahun berjalan	1.917.338	182.897	643.587	125.307	6.880	31.835	2.907.844
Penerimaan kembali kredit yang telah dihapus-bukukan	17.442	3.867	44.098	11.658	-	-	77.065
Penghapusbukuan kredit	(1.388.988)	(170.805)	(1.411.193)	(88.181)	-	(8.701)	(3.067.868)
Saldo akhir tahun	6.910.527	280.331	6.767.137	1.575.398	22.373	36.198	15.591.964
Penurunan nilai individual	597.521	31.471	5.134.111	1.390.288	-	4.182	7.157.573
Penurunan nilai kolektif	6.313.006	248.860	1.633.026	185.110	22.373	32.016	8.434.391
Jumlah kotor kredit yang secara individu ditentukan sebagai mengalami penurunan nilai sebelum dikurangi kerugian penurunan nilai atas penilaian secara individual	621.615	33.934	9.696.781	5.455.467	-	3.815	15.811.612

Beginning balance
Provision for
impairment losses
during the year

Recovery of loans written-off
Loans written-off

Balance at the end of year

Individual impairment
Collective impairment

Gross amount of loans
individually determined to
be impaired, before deducting
any individually assessed
impairment losses

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

46. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Kredit (lanjutan)

- (vi) Mutasi cadangan berdasarkan jenis kredit yang diberikan adalah sebagai berikut: (lanjutan)

46. RISK MANAGEMENT (continued)

Credit Risk (continued)

- (vi) Movements in allowance for impairment losses by type of loans are as follows: (continued)

31 Desember/December 31, 2022							
	Konsumsi/Konsumer						Total
	Pemilikan Rumah/ Housing Loan	Non-kepemilikan Rumah/ Non-Housing Loan	Modal Kerja/ Working Capital	Investasi/ Investment	Sindikasi/ Syndicated	Direksi dan Karyawan/ Directors and Employee	
Saldo Awal	4.296.939	309.075	8.485.819	1.302.032	7.618	34.277	14.435.760
Penyisihan kerugian penurunan nilai selama tahun berjalan	3.420.001	69.993	38.379	495.348	7.875	7.911	4.039.507
Penerimaan kembali kredit yang telah dihapus-bukukan	11.764	3.838	49.698	6.416	-	-	71.716
Penghapusbukuan kredit	(1.363.969)	(118.534)	(1.083.251)	(277.182)	-	(29.124)	(2.872.060)
Saldo akhir tahun	6.364.735	264.372	7.490.645	1.526.614	15.493	13.064	15.674.923
Penurunan nilai individual	889.594	86.221	4.902.353	1.331.382	-	1.229	7.210.779
Penurunan nilai kolektif	5.475.141	178.151	2.588.292	195.232	15.493	11.835	8.464.144
Jumlah kotor kredit yang secara individu ditentukan sebagai mengalami penurunan nilai sebelum dikurangi kerugian penurunan nilai atas penilaian secara individual	893.068	85.794	8.057.392	5.078.192	-	1.108	14.115.554

Gross amount of loans individually determined to be impaired, before deducting any individually assessed impairment losses

Risiko Likuiditas

Risiko Likuiditas merupakan risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank. Ketidakmampuan memperoleh sumber pendanaan arus kas sehingga menimbulkan Risiko Likuiditas dapat disebabkan antara lain oleh:

- Ketidakmampuan menghasilkan arus kas yang berasal dari aset produktif maupun yang berasal dari penjualan aset termasuk aset likuid; dan/atau
- Ketidakmampuan menghasilkan arus kas yang berasal dari penghimpunan dana, transaksi antar Bank, dan pinjaman yang diterima.

Liquidity Risk

Liquidity risk is the risk arising from the inability of the Bank to meet the maturing obligations from cash flow funding sources and/or from high-quality liquid assets that can be pledged, without disturbing the activities and financial condition of the Bank. The inability to obtain funding for cash flows resulting to liquidity risk can be contributed, among others, by:

- Inability to generate cash flows from productive assets as well as from the sale of assets, including liquid assets; and/or
- Inability to generate cash flows from funding, inter-bank transactions and fund borrowings.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

46. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Likuiditas (lanjutan)

Secara umum, tujuan utama manajemen risiko untuk risiko likuiditas adalah untuk meminimalkan kemungkinan ketidakmampuan Bank dalam memperoleh sumber pendanaan arus kas. Dengan demikian Bank dapat memenuhi setiap kewajiban finansial yang sudah diperjanjikan secara tepat waktu, dan agar senantiasa dapat memelihara tingkat likuiditas yang memadai dan optimal. Kebijakan pengelolaan risiko likuiditas antara lain mencakup pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi, yang pada intinya mengatur penerapan Manajemen Risiko likuiditas pada Bank, Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit yang secara umum mencakup strategi manajemen risiko likuiditas, tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) dan Sistem Informasi Manajemen Risiko serta Sistem Pengendalian Internal dengan menerapkan pengendalian internal dan kaji ulang independen yang memadai terhadap penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko likuiditas yang dilaksanakan oleh *Internal Audit Division* (IAD) dan *Enterprise Risk Management Division* (ERMD).

Pengendalian risiko likuiditas melalui strategi pendanaan, pengelolaan posisi likuiditas dan pemantauan risiko likuiditas harian, pengelolaan aset likuid yang berkualitas tinggi, dan rencana pendanaan darurat serta penerapan sistem informasi manajemen risiko secara wajar untuk mendukung pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian, serta pelaporan risiko likuiditas dalam kondisi normal dan kondisi krisis secara lengkap, akurat, terkini dan berkesinambungan.

Alat pengukuran yang digunakan dalam pengukuran Risiko Likuiditas antara lain adalah Rasio Likuiditas, Profil Maturitas, Proyeksi Arus Kas, dan *Stress Testing* (pengujian terhadap kemampuan Bank untuk memenuhi kebutuhan likuiditas pada kondisi krisis dengan menggunakan skenario *stress* secara spesifik pada Bank maupun skenario *stress* pada faktor pasar).

46. RISK MANAGEMENT (continued)

Liquidity Risk (continued)

In general, the main objective of risk management for liquidity risk is to minimize the possibility of the Bank's inability to obtain source of cash flow funding. Thus, the Bank can meet some financial obligations that have been agreed upon in a timely manner, and to always be able to maintain adequate and optimal levels of liquidity. Liquidity risk management policies include the active supervision of the Board Of Commissioners and Board Of Directors who basically set the implementation of the Bank's liquidity risk management, policy, procedures and determination of limits, which generally includes the liquidity risk management strategy, level of risk to be taken (risk appetite) and risk tolerance, and risk management process, information systems and internal control systems by implementing internal controls and adequate independent review of the risk management implementation for liquidity risk which are being carried out by the Management and conducted by the Internal Audit Division (IAD) and Enterprise Risk Management Division (ERMD).

Liquidity risk management is being carried out through funding strategy, liquidity positions and monitoring of daily liquidity, management of high quality liquid assets, planning the emergency funding as well as implementation of a sound risk management information system to support the process of identification, measurement, monitoring and control, as well as reporting of liquidity risk under normal and extreme conditions in a comprehensive, accurate, timely and sustainable manner.

The tools used in the measurement of liquidity risk among others are Liquidity Ratio, Maturity Profile, Cash Flow Projection, and Stress Testing (testing the Bank's ability to meet liquidity needs on a state of crisis by using the specific stress scenarios on the Bank as well as on the market factor).

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

46. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Likuiditas (lanjutan)

Tabel jatuh tempo berikut menyajikan informasi mengenai perkiraan sisa jatuh tempo dari aset dan liabilitas keuangan:

46. RISK MANAGEMENT (continued)

Liquidity Risk (continued)

The following maturity tables provide information about the expected maturities of the Bank's financial assets and liabilities:

31 Desember/December 31, 2023							
	Total	Lainnya/ Others *)	≤ 1 Bulan/ ≤ 1 Month	> 1 - 6 Bulan/ Months	> 6 - 12 Bulan/ > 6 - 12 Months	> 12 Bulan/ > 12 Months	
ASET							ASSETS
Kas	2.127.489	-	2.127.489	-	-	-	Cash
Giro pada Bank Indonesia	18.145.761	-	18.145.761	-	-	-	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	2.201.594	(1.804)	2.203.398	-	-	-	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	30.561.122	-	30.561.122	-	-	-	Placements with Bank Indonesia and other banks
Efek-efek	5.282.970	(22.903)	2.979.680	389.173	50.000	1.887.020	Securities
Obligasi Pemerintah	35.893.929	-	7.777.100	3.644.949	1.339.247	23.132.633	Government bonds
Tagihan Akseptasi	520.691	(23.876)	544.567	-	-	-	Acceptance Receivable
Tagihan Derivatif	32.176	-	-	-	-	32.176	Derivative Receivables
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah	318.106.177	(15.591.964)	4.924.164	3.585.313	6.396.209	318.792.455	Loans and sharia financing/receivables
Bunga yang masih akan diterima	11.526.687	-	11.526.687	-	-	-	Interest receivable
Aset lain-lain**)	1.873.496	-	1.873.496	-	-	-	Other assets**)
Total	426.272.092	(15.640.547)	82.663.464	7.619.435	7.785.456	343.844.284	Total
LIABILITAS							LIABILITIES
Liabilitas segera ***)	2.567.271	-	2.567.271	-	-	-	Liabilities due immediately***)
Simpanan nasabah	322.501.148	-	225.525.422	78.653.684	18.036.635	285.407	Deposits from customers
Simpanan dari bank lain	91.312	-	91.312	-	-	-	Deposits from other banks
Surat berharga yang diterbitkan	8.272.098	-	-	1.698.524	1.811.017	4.762.557	Securities issued
Liabilitas akseptasi	544.567	-	362.394	182.173	-	-	Acceptance payable
Liabilitas Derivatif	-	-	-	-	-	-	Derivative payable
Pinjaman yang diterima	33.762.089	-	-	6.139.851	6.454.998	21.167.240	Fund borrowings
Bunga yang masih harus dibayar	647.496	-	647.496	-	-	-	Interest payables
Liabilitas lain-lain****)	521.548	-	521.548	-	-	-	Other liabilities****)
Pinjaman dan efek-efek subordinasi	9.112.837	-	-	-	-	9.112.837	Subordinated Loan Securities
Total	378.020.366	-	229.715.443	86.674.232	26.302.650	35.328.041	Total
Perbedaan jatuh tempo	48.251.726	(15.640.547)	(147.051.979)	(79.054.797)	(18.517.194)	308.516.243	Maturity gap

*) Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan.

**) Terdiri atas tagihan pihak ketiga.

***) Terdiri atas kewajiban kepada pihak ketiga, bagi hasil yang belum dibagikan, deposito berjangka jatuh tempo dan bunga atas deposito berjangka namun belum diambil nasabah.

****) Terdiri atas setoran jaminan dan dana jaminan pengembang (kewajiban kepada pihak ketiga).

*) Allowance for impairment losses on financial assets.

**) Consists of third party receivables.

***) Consists of third party payables, undistributed profit sharing, matured time deposits and interest on time deposits not collected by customers.

****) Consists of guarantee deposits and developers' security deposits (liabilities to third party).

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

46. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Likuiditas (lanjutan)

Tabel jatuh tempo berikut menyajikan informasi mengenai perkiraan sisa jatuh tempo dari aset dan liabilitas keuangan (lanjutan):

46. RISK MANAGEMENT (continued)

Liquidity Risk (continued)

The following maturity tables provide information about the expected maturities of the Bank's financial assets and liabilities (continued):

31 Desember/December 31, 2022							
	Total	Lainnya/ Others *)	≤ 1 Bulan/ ≤ 1 Month	> 1 - 6 Bulan/ Months	> 6 - 12 Bulan/ > 6 - 12 Months	> 12 Bulan/ > 12 Months	
ASET							ASSETS
Kas	1.661.533	-	1.661.533	-	-	-	Cash
Giro pada Bank Indonesia	25.416.941	-	25.416.941	-	-	-	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	1.470.510	(1.747)	1.472.257	-	-	-	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	12.975.955	-	12.975.955	-	-	-	Placements with Bank Indonesia and other banks
Efek-efek	1.720.769	(2.399)	1.455.405	8.260	82.165	177.338	Securities
Obligasi Pemerintah	51.964.973	-	37.540.672	3.266.511	512.540	10.645.250	Government bonds
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	1.434.190	-	1.434.190	-	-	-	Securities purchased under agreement to resell
Tagihan Akseptasi	420.426	(136)	80.697	339.865	-	-	Acceptance Receivable
Tagihan Derivatif	103.939	-	43.543	29.284	512.540	10.645.250	Derivative Receivables
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah	282.606.781	(15.674.923)	5.336.769	4.811.050	5.887.466	282.246.419	Loans and sharia financing/receivables
Bunga yang masih akan diterima	10.750.302	-	10.750.302	-	-	-	Interest receivable
Aset lain-lain**)	1.040.048	-	1.040.048	-	-	-	Other assets**)
Total	391.566.367	(15.679.205)	99.208.312	8.454.970	6.994.711	303.714.257	Total
LIABILITAS							LIABILITIES
Liabilitas segera ***)	2.588.471	-	2.588.471	-	-	-	Liabilities due immediately***)
Simpanan nasabah	297.099.801	-	174.667.266	58.829.356	9.198.718	54.404.461	Deposits from customers
Simpanan dari bank lain	136.408	-	136.408	-	-	-	Deposits from other banks
Surat berharga yang diterbitkan	8.652.260	-	-	1.999.919	725.924	5.926.417	Securities issued
Liabilitas Derivatif	-	-	-	-	-	-	Derivative Liabilities
Liabilitas akseptasi	420.562	-	80.697	339.865	-	-	Acceptance payable
Pinjaman yang diterima	24.821.005	-	499.997	-	2.000.000	22.321.008	Fund borrowings
Bunga yang masih harus dibayar	629.366	-	629.366	-	-	-	Interest payables
Liabilitas lain-lain****)	4.690.821	-	4.690.821	-	-	-	Other liabilities****)
Pinjaman dan efek-efek subordinasi	9.158.219	-	-	-	-	9.158.219	Subordinated Loan Securities
Total	348.196.913	-	183.293.026	61.169.140	11.924.642	91.810.105	Total
Perbedaan jatuh tempo	43.369.454	(15.679.205)	(84.084.714)	(52.714.170)	(4.929.931)	211.904.152	Maturity gap

*) Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan.
 **) Terdiri atas tagihan pihak ketiga.
 ***) Terdiri atas kewajiban kepada pihak ketiga, bagi hasil yang belum dibagikan, deposito berjangka jatuh tempo dan bunga atas deposito berjangka namun belum diambil nasabah.
 *****) Terdiri atas setoran jaminan dan dana jaminan pengembang (kewajiban kepada pihak ketiga).

*) Allowance for impairment losses on financial assets.
 **) Consists of third party receivables.
 ***) Consists of third party payables, undistributed profit sharing, matured time deposits and interest on time deposits not collected by customers.
 *****) Consists of guarantee deposits and developers' security deposits (liabilities to third party).

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

46. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Likuiditas (lanjutan)

Tabel di bawah ini menunjukkan sisa jatuh tempo kontraktual dari liabilitas keuangan berdasarkan pada arus kas yang tidak didiskonto (pokok dan bunga):

31 Desember/December 31, 2023						
Total	On demand	≤ 1 Bulan/ Month	> 1 - 6 Bulan/ Months	> 6 - 12 Bulan/ Months	> 12 Bulan/ Months	
LIABILITAS						
Liabilitas segera*)	2.567.271	-	2.567.271	-	-	-
Simpanan nasabah						
Deposito berjangka	141.895.950	-	90.316.293	40.542.872	10.987.612	49.173
Tabungan	38.998.753	38.998.753	-	-	-	-
Giro	142.808.756	78.489.050	-	-	-	64.319.706
Simpanan dari bank lain	91.312	91.312	-	-	-	-
Liabilitas akseptasi	544.567	-	544.567	-	-	-
Liabilitas derivatif	-	-	-	-	-	-
Surat berharga yang diterbitkan	9.453.602	-	75.426	1.935.160	2.085.568	5.357.448
Pinjaman yang diterima	43.613.659	-	125.750	6.751.324	8.120.580	28.616.005
Bunga yang masih harus dibayar	647.496	-	647.496	-	-	-
Liabilitas lain-lain**)	521.548	-	521.548	-	-	-
Pinjaman Subordinasi dan Efek-efek subordinasi	9.825.769	-	47.979	239.897	3.287.876	6.250.017
Total	390.968.683	117.579.115	94.846.330	49.469.253	24.481.636	104.592.349

LIABILITIES						
Liabilities due immediately*)						
Deposits from customers						
Time deposits						
Savings deposits						
Demand deposits						
Deposits from other banks						
Acceptance payable						
Derivative Liabilities						
Securities issued						
Fund borrowings						
Interest payables						
Other liabilities**)						
Subordinated Loan and securities						
Total						

31 Desember/December 31, 2022						
Total	On demand	≤ 1 Bulan/ Month	> 1 - 6 Bulan/ Months	> 6 - 12 Bulan/ Months	> 12 Bulan/ Months	
LIABILITAS						
Liabilitas segera*)	2.588.471	-	2.588.471	-	-	-
Simpanan nasabah						
Deposito berjangka	148.981.512	-	66.763.135	59.616.536	9.631.572	12.970.268
Tabungan	37.376.047	37.376.047	-	-	-	-
Giro	113.525.727	70.664.584	-	-	-	42.861.143
Simpanan dari bank lain	136.408	136.408	-	-	-	-
Liabilitas derivatif	-	-	-	-	-	-
Liabilitas akseptasi	420.562	-	80.697	339.865	-	-
Surat berharga yang diterbitkan	10.110.074	-	72.842	2.245.500	991.612	6.800.120
Pinjaman yang diterima	32.698.776	-	85.148	1.026.370	2.602.004	28.985.254
Bunga yang masih harus dibayar	629.366	-	629.366	-	-	-
Liabilitas lain-lain**)	4.690.821	-	4.690.821	-	-	-
Pinjaman Subordinasi dan Efek-efek subordinasi	10.562.334	-	48.158	240.792	288.950	9.984.434
Total	361.720.098	108.177.039	74.958.638	63.469.063	13.514.138	101.601.219

LIABILITIES						
Liabilities due immediately*)						
Deposits from customers						
Time deposits						
Savings deposits						
Demand deposits						
Deposits from other banks						
Derivative liabilities						
Acceptance payable						
Securities issued						
Fund borrowings						
Interest payables						
Other liabilities**)						
Subordinated Loan and securities						
Total						

*) Terdiri atas kewajiban kepada pihak ketiga, bagi hasil yang belum dibagikan, deposito berjangka jatuh tempo dan bunga atas deposito berjangka namun belum diambil nasabah.
 **) Terdiri atas setoran jaminan dan dana jaminan pengembang (kewajiban kepada pihak ketiga).

*) Consists of third party payables, undistributed profit sharing, matured time deposits and interest on time deposits not collected by customers.
 **) Consists of guarantee deposits and developers' security deposits (liabilities to third party).

Risiko Pasar

Risiko Pasar merupakan risiko pada laporan posisi keuangan dan rekening administratif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar.

Market Risk

Market risk is the risk on statement of financial position and administrative accounts, due to changes in overall market conditions.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

46. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Pasar (lanjutan)

Sesuai Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 /SEOJK.03/2018 tanggal 21 Agustus 2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko dan Pengukuran Risiko Pendekatan Standar, Bank menggunakan perhitungan *Standardized Method* yang digunakan untuk menghitung Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) untuk Risiko Pasar. Risiko nilai tukar yang timbul dari fluktuasi nilai tukar dikelola dengan cara menjaga Posisi Devisa Neto sesuai dengan peraturan Bank Indonesia. Gejolak eksternal juga diakomodasi dengan dilakukan *stress testing* untuk melihat sejauh mana Bank dapat bertahan dengan beberapa skenario perubahan kondisi eksternal, khususnya perubahan suku bunga pasar.

Termasuk di dalam risiko pasar adalah risiko perubahan harga instrumen keuangan akibat perubahan faktor-faktor pasar, seperti perubahan suku bunga dan perubahan nilai tukar.

i. Risiko tingkat suku bunga

Risiko tingkat bunga timbul dari adanya kemungkinan bahwa perubahan tingkat suku bunga akan mempengaruhi arus kas di masa yang akan datang dari nilai wajar instrumen keuangan.

Tabel di bawah ini menyajikan informasi mengenai tingkat suku bunga rata-rata per tahun untuk aset dan liabilitas keuangan yang penting untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022:

Aset	31 Desember/December 31, 2023	
	Rupiah	Mata Uang Asing/ Foreign currencies
Giro pada bank lain	0,69%	0,00%
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	5,23%	5,24%
Efek-efek Obligasi pemerintah	5,27%	4,13%
Tingkat bunga tetap	3,74%	3,07%
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	5,74%	0,00%
Kredit yang diberikan dan Piutang syaria	8,06%	6,08%
Liabilitas		
Simpanan nasabah		
Giro	2,21%	4,51%
Tabungan	1,53%	0,21%
Deposito berjangka	5,34%	4,25%
Simpanan dari Bank lain		
Giro	1,12%	0,00%
Deposito Berjangka	4,69%	0,00%
Inter-bank call money	5,65%	0,00%
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	5,97%	0,00%
Surat berharga yang diterbitkan	7,99%	0,00%
Pinjaman yang diterima	5,08%	1,37%
Pinjaman subordinasi dan efek-efek Subordinasi	8,28%	4,20%

46. RISK MANAGEMENT (continued)

Market Risk (continued)

In accordance with the Financial Services Authority Circular No.12 /SEOJK.03/2018 dated in August 21, 2018 regarding the Implementation of Risk Management and Measurement of Risk in the Standard Approach In measuring market risk, the Bank uses the Standardized Method in calculating minimum Capital Adequacy Ratio (CAR) for market risk. Exchange rate risk arises from fluctuations in exchange rates maintained by keeping the net open position in accordance with Bank Indonesia regulations. External shocks are also being considered by stress testing, which is done to measure the extent to which the Bank can survive some scenario changes in external conditions, particularly changes in market interest rates.

Market risk includes the risk of price changes of financial instruments due to changes in market factors, such as changes in interest rates and exchange rates.

i. Interest rate risk

Interest rate risks arise from the possibility that changes in interest rates will affect future cash flows from the fair values of financial instruments.

The following table presents information on the average annual interest rates for significant financial assets and liabilities for the year ended December 31, 2023 and 2022:

	31 Desember/December 31, 2022		Assets
	Rupiah	Mata Uang Asing/ Foreign currencies	
	0,19%	0,00%	Current accounts with other Bank
			Placements with Bank Indonesia and other banks
	3,47%	0,96%	Securities
	8,59%	4,13%	Government bonds
			Fixed interest rate
	3,60%	2,93%	Securities purchased under agreement to resell
	4,21%	0,00%	Loans and sharia financing/ receivables
	8,14%	4,48%	
			Liabilities
			Deposits from customers
			Demand deposits
			Savings deposits
			Time deposits
			Deposits from other banks
			Demand deposits
			Time deposits
			Inter-bank call money
			Securities sold under repurchase agreements
			Securities issued
			Fund borrowing
			Subordinated loan and securities
	8,28%	4,20%	

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

46. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Pasar (lanjutan)

i. Risiko tingkat suku bunga (lanjutan)

Tabel di bawah ini mengikhtisarkan eksposur Bank terhadap risiko tingkat suku bunga (gross):

46. RISK MANAGEMENT (continued)

Market Risk (continued)

i. Interest rate risk (continued)

The tables below summarize the Bank's exposure to interest rate risk (gross):

31 Desember/December 31, 2023								
Suku bunga mengambang/Variable interest rate								
	Tidak lebih dari 3 bulan/ Not more than 3 months	Lebih dari 3 bulan tetapi tidak lebih dari 1 tahun/ More than 3 months but less than 1 year	Lebih dari 1 tahun/ More than 1 year	Suku bunga tetap/ Fixed interest rate	Tidak dikenakan bunga/syariah Non-interest bearing/sharia	Total		
Aset Keuangan							Financial Assets	
Kas	-	-	-	-	2.127.489	2.127.489	Cash	
Giro pada Bank Indonesia	-	-	-	14.317.572	3.828.189	18.145.761	Current accounts with Bank Indonesia	
Giro pada bank lain	2.203.198	-	-	-	200	2.203.398	Current accounts with other banks	
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	-	-	-	27.411.122	3.150.000	30.561.122	Placements with Bank Indonesia and other banks	
Efek-efek	1.042.013	-	-	4.154.990	108.870	5.305.873	Securities	
Obligasi pemerintah	-	-	-	21.735.376	14.158.553	35.893.929	Government bonds	
Tagihan Akseptasi	-	-	-	-	544.567	544.567	Acceptance Receivable	
Tagihan Derivatif	-	-	-	32.176	-	32.176	Derivative receivables	
Kredit yang diberikan dan piutang /pembiayaan syariah	4.843.685	8.545.336	142.367.230	140.827.609	37.114.281	333.698.141	Loans and sharia financing/ receivable	
Bunga yang masih akan diterima	-	-	-	-	11.526.687	11.526.687	Interest receivable	
Aset lain-lain ^{*)}	-	-	-	-	1.873.496	1.873.496	Other assets ^{*)}	
Total aset keuangan	8.088.896	8.545.336	142.367.230	208.478.845	74.432.332	441.912.639	Total financial assets	
Liabilitas Keuangan							Financial Liabilities	
Liabilitas segera ^{**)}	-	-	-	-	2.567.271	2.567.271	Liabilities due immediately ^{**)}	
Simpanan dari nasabah							Deposits from customers	
Giro	75.362.852	-	-	54.006.439	13.439.465	142.808.756	Demand deposits	
Tabungan	37.722.161	-	-	-	1.276.592	38.998.753	Savings deposits	
Deposito berjangka	-	-	-	140.693.639	-	140.693.639	Time deposits	
Simpanan dari bank lain	-	-	-	-	91.312	91.312	Deposits from other banks	
Liabilitas akseptasi	-	-	-	-	544.567	544.567	Acceptance payable	
Liabilitas derivatif	-	-	-	-	-	-	Securities issued	
Surat-surat berharga diterbitkan	-	-	-	8.006.252	265.846	8.272.098	Fund Borrowings	
Pinjaman yang diterima	-	-	-	30.531.530	3.230.559	33.762.089	Interest payables	
Bunga yang masih harus dibayar	-	-	-	-	647.496	647.496	Other liabilities ^{***)}	
Liabilitas lain-lain ^{***)}	-	-	-	-	521.548	521.548	Subordinated Loan and Securities	
Pinjaman subordinasi dan Efek-efek subordinasi	-	-	-	9.112.837	-	9.112.837		
Total liabilitas keuangan	113.085.013	-	-	242.350.697	22.584.656	378.020.366	Total financial liabilities	
Gap repricing suku bunga-kotor	(104.996.117)	8.545.336	142.367.230	(33.871.852)	51.847.676	63.892.273	Gross interest repricing gap	

*) Terdiri dari tagihan kepada pihak ketiga.

**) Terdiri dari kewajiban kepada pihak ketiga, bagi hasil yang belum dibagikan, deposito berjangka jatuh tempo dan bunga atas deposito berjangka namun belum diambil nasabah.

***) Terdiri atas setoran jaminan dan dana jaminan pengembang (kewajiban kepada pihak ketiga).

*) Consists of third party receivables.

**) Consists of third party payables, undistributed profit sharing, matured time deposits and interest on time deposits not collected by customers.

***) Consists of guarantee deposits and developers' security deposits (liabilities to third party).

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

46. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Pasar (lanjutan)

i. Risiko tingkat suku bunga (lanjutan)

Tabel di bawah ini mengikhtisarkan eksposur Bank terhadap risiko tingkat suku bunga (gross) (lanjutan):

46. RISK MANAGEMENT (continued)

Market Risk (continued)

i. Interest rate risk (continued)

The tables below summarize the Bank's exposure to interest rate risk (gross)(continued):

31 Desember/December 31, 2022							
Suku bunga mengambang/Variable interest rate							
	Tidak lebih dari 3 bulan/ Not more than 3 months	Lebih dari 3 bulan tetapi tidak lebih dari 1 tahun/ More than 3 months but less than 1 year	Lebih dari 1 tahun/ More than 1 year	Suku bunga tetap/ Fixed interest rate	Tidak dikenakan bunga/syariah Non-interest bearing/sharia	Total	
Aset Keuangan							Financial Assets
Kas	-	-	-	-	1.661.533	1.661.533	Cash
Giro pada Bank Indonesia	22.035.579	-	-	-	3.381.362	25.416.941	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	1.471.059	-	-	-	1.198	1.472.257	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	-	-	-	10.897.955	2.078.000	12.975.955	Placements with Bank Indonesia and other banks
Efek-efek	793.831	-	-	816.282	113.055	1.723.168	Securities
Obligasi pemerintah	-	-	-	43.150.065	8.814.908	51.964.973	Government bonds
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	-	-	-	1.434.190	-	1.434.190	Securities purchases under agreement to resell
Tagihan akseptasi	-	-	-	-	420.562	420.562	Acceptance receivable
Tagihan derivatif	-	-	-	103.939	-	103.939	Derivative receivables
Kredit yang diberikan dan piutang /pembiayaan syariah	3.898.479	9.715.127	187.066.985	65.976.974	31.624.139	298.281.704	Loans and sharia financing/receivable
Bunga yang masih akan diterima	-	-	-	-	10.750.302	10.750.302	Interest receivable
Aset lain-lain ^{*)}	-	-	-	-	1.040.048	1.040.048	Other assets ^{*)}
Total aset keuangan	28.198.948	9.715.127	187.066.985	122.379.405	59.885.107	407.245.572	Total financial assets
Liabilitas Keuangan							Financial Liabilities
Liabilitas segera ^{*)}	-	-	-	-	2.614.055	2.614.055	Liabilities due immediately ^{*)}
Simpanan dari nasabah							Deposits from customers
Giro	62.039.775	-	-	42.861.143	8.624.809	113.525.727	Demand deposits
Tabungan	36.182.329	-	-	-	1.193.718	37.376.047	Savings deposits
Deposito berjangka	-	-	-	146.198.027	-	146.198.027	Time deposits
Simpanan dari bank lain	136.408	-	-	-	-	136.408	Deposits from other banks
Liabilitas akseptasi	-	-	-	-	420.562	420.562	Acceptance payable
Liabilitas derivatif	-	-	-	-	-	-	Derivative liabilities
Surat-surat berharga diterbitkan	-	-	-	8.652.260	-	8.652.260	Securities issued
Pinjaman yang diterima	-	-	-	22.803.052	2.017.953	24.821.005	Fund Borrowings
Bunga yang masih harus dibayar	-	-	-	-	629.366	629.366	Interest payables
Liabilitas lain-lain ^{**)}	-	-	-	-	4.690.821	4.690.821	Other liabilities ^{**)}
Pinjaman subordinasi dan Efek-efek subordinasi	-	-	-	9.158.219	-	9.158.219	Subordinated Loan and Securities
Total liabilitas keuangan	98.358.512	-	-	229.672.701	20.191.284	348.222.467	Total financial liabilities
Gap repricing suku bunga-kotor	(70.159.564)	9.715.127	187.066.985	(107.293.296)	39.693.823	59.023.105	Gross interest repricing gap

*) Terdiri dari tagihan kepada pihak ketiga.

**) Terdiri dari kewajiban kepada pihak ketiga, bagi hasil yang belum dibagikan, deposito berjangka jatuh tempo dan bunga atas deposito berjangka namun belum diambil nasabah.

***) Terdiri atas setoran jaminan dan dana jaminan pengembang (kewajiban kepada pihak ketiga).

*) Consists of third party receivables.

**) Consists of third party payables, undistributed profit sharing, matured time deposits and interest on time deposits not collected by customers.

***) Consists of guarantee deposits and developers' security deposits (liabilities to third party).

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

46. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Pasar (lanjutan)

i. Risiko tingkat suku bunga (lanjutan)

Analisis sensitivitas untuk beberapa faktor pasar menunjukkan bagaimana laba atau rugi dan ekuitas dapat dipengaruhi oleh perubahan dari beberapa faktor risiko sesuai dengan tabel dibawah ini. Secara umum, sensitivitas diestimasi dengan membandingkan suatu nilai awal ke nilai tertentu setelah perubahan tertentu dari faktor pasar, dengan mengasumsikan seluruh variabel lainnya tetap. Sensitivitas atas laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain merupakan efek atas perubahan estimasi suku bunga tetap atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan nilai wajar melalui laba rugi pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022. Analisis sensitivitas atas ekuitas dihitung dengan menilai kembali perubahan estimasi suku bunga tetap atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan nilai wajar melalui laba rugi pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022. Jumlah sensitivitas atas ekuitas didasarkan pada asumsi bahwa terdapat perubahan paralel dalam kurva imbal hasil.

Tabel dibawah ini menunjukkan sensitivitas dari laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan ekuitas Bank terhadap kemungkinan perubahan wajar atas suku bunga untuk aset dan liabilitas keuangan dengan suku bunga tetap pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, terdapat perubahan signifikan dibandingkan dengan Desember 2022 atas dampak ke laba rugi dan ekuitas dikarenakan peningkatan portofolio surat berharga dalam USD:

46. RISK MANAGEMENT (continued)

Market Risk (continued)

i. Interest rate risk (continued)

Sensitivity analyses for several market factors showing how profit or loss and equity could be affected by changes in the relevant risk factor are shown in the tables below. In general, sensitivity is estimated by comparing an initial value to the value derived after a specified change in the market factor, assuming all other variables are constant. The sensitivity of the statement of profit or loss and other comprehensive income is the effect of the assumed changes in interest rates on the profit or loss for a period, based on the variable rate trading and non-trading financial assets and liabilities held by the Bank as of December 31, 2023 and 2022. The sensitivity of equity is calculated by revaluing fixed interest rate fair value through other comprehensive income and fair value to profit or loss financial assets as of December 31, 2023 and 2022 for the effects of the assumed changes in interest rates. The total sensitivity of equity is based on the assumption that there are parallel shifts in the yield curve.

The tables below demonstrate the sensitivity of the Bank's statement of profit or loss and other comprehensive income and equity to reasonably possible changes in interest rates for fixed rate financial assets and liabilities as of December 31, 2023 and 2022, there is significant changes compare to December 2022 from impact of profit or loss and equity because of the increasing from securities in USD:

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

46. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

46. RISK MANAGEMENT (continued)

Risiko Pasar (lanjutan)

Market Risk (continued)

i. Risiko tingkat suku bunga (lanjutan)

i. Interest rate risk (continued)

31 Desember/December 31, 2023

	Perubahan basis poin/Change in basis point	Dampak ke laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya sebelum pajak/ Impact to Statement of Comprehensive Income before tax	Dampak ke ekuitas/ Impact to Equity	
Rupiah	+125	(67.861)	(285.489)	Rupiah
	+50	(28.181)	(116.975)	
	-50	29.653	120.901	
	-125	77.208	310.063	
Dolar Amerika Serikat	+125	(146)	(567.433)	United States Dollar
	+50	(58)	(241.791)	
	-50	59	264.001	
	-125	146	706.923	

31 Desember/December 31, 2022

	Perubahan basis poin/Change in basis point	Dampak ke laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya sebelum pajak/ Impact to Statement of profit or loss and Other Comprehensive Income before tax	Dampak ke ekuitas/ Impact to Equity	
Rupiah	+125	(43.380)	(556.734)	Rupiah
	+50	(17.878)	(230.043)	
	-50	18.623	240.557	
	-125	48.045	622.570	
Dolar Amerika Serikat	+125	-	(546.154)	United States Dollar
	+50	-	(232.895)	
	-50	-	254.593	
	-125	-	682.459	

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

46. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Pasar (lanjutan)

i. Risiko tingkat suku bunga (lanjutan)

Tabel dibawah ini menunjukkan sensitivitas dari laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain terhadap kemungkinan perubahan suku bunga untuk aset dan liabilitas keuangan dengan suku bunga *variable* pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022:

31 Desember/December 31, 2023		
	Perubahan basis poin/ Change in basis point	Pengaruh ke laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya/ Impact to Statement of profit or loss and other comprehensive income
Rupiah	±125	±410.748
	±50	±164.299

31 Desember/December 31, 2022		
	Perubahan basis poin/ Change in basis point	Pengaruh ke laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya/ Impact to Statement of profit or loss and other comprehensive income
Rupiah	±125	±405.949
	±50	±162.380

ii. Risiko Nilai Tukar

Risiko nilai tukar adalah kemungkinan kerugian yang timbul dari perubahan kurs valuta asing. Bank mengelola paparan terhadap pengaruh fluktuasi nilai tukar dengan Posisi Devisa Neto sesuai dengan peraturan OJK (tidak diaudit).

46. RISK MANAGEMENT (continued)

Market Risk (continued)

i. Interest rate risk (continued)

The tables below demonstrate the sensitivity of profit or loss and other comprehensive income to reasonably possible changes in interest rates for variable rate financial assets and liabilities as of December 31, 2023 and 2022:

ii. Exchange rate risk

Exchange rate risk is the probability of loss to earnings arising from changes in foreign exchange rates. The Bank manages exposure to effects of fluctuations in exchange rates with Net Open Position based on OJK regulations (unaudited).

31 Desember/December 31, 2023		
	Perubahan persentase nilai tukar mata uang asing/ Percentage change in foreign currency rate	Pengaruh ke laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya/ Impact to Statement of profit or loss and other comprehensive income
Dolar Amerika Serikat	±0.30%	±3.840
	±0.35%	±4.480

United States Dollar

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

46. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Pasar (lanjutan)

ii. Risiko Nilai Tukar (lanjutan)

Risiko nilai tukar adalah kemungkinan kerugian yang timbul dari perubahan kurs valuta asing. Bank mengelola paparan terhadap pengaruh fluktuasi nilai tukar dengan Posisi Devisa Neto sesuai dengan peraturan OJK (tidak diaudit). (lanjutan)

46. RISK MANAGEMENT (continued)

Market Risk (continued)

ii. Exchange rate risk (continued)

Exchange rate risk is the probability of loss to earnings arising from changes in foreign exchange rates. The Bank manages exposure to effects of fluctuations in exchange rates with Net Open Position based on OJK regulations (unaudited). (continued)

31 Desember/December 31, 2022

	Perubahan persentase nilai tukar mata uang asing/ Percentage change in foreign currency rate	Pengaruh ke laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya/ Impact to Statement of profit or loss and other comprehensive income	
Dolar Amerika Serikat	±0.30% ±0.35%	±1.106 ±1.290	United States Dollar

Sensitivitas atas laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain merupakan dampak yang diestimasi atas perubahan yang diasumsikan atas perubahan nilai tukar berdasarkan aset dan liabilitas keuangan dalam mata uang asing.

The sensitivity of the statement of profit or loss and other comprehensive income is the estimated effect of the assumed change in foreign currency exchange rates on income, based on foreign currency denominated assets and liabilities.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, dampak atas perubahan nilai tukar mata uang lainnya seperti Pound Sterling Inggris, Euro Eropa, Yen Jepang, Dolar Singapura, Dolar Australia dan Dolar Hongkong tidak material.

As of December 31, 2023 and 2022, the effect of fluctuations in exchange rates of other currencies, such as British Pound Sterling, European Euro, Japanese Yen, Singapore Dollar, Australian Dollar and Hongkong Dollar, is not material.

Risiko Operasional

Risiko Operasional merupakan risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.

Operational Risk

Operational risk is a risk arising from the inadequacy and/or failure of internal processes, human error, system failure, and/or the presence of external events that can affect the operations of the Bank.

Risiko Operasional yang timbul harus segera diantisipasi. Pencadangan modal yang dilakukan Bank dihitung berdasarkan kebutuhan modal minimum (CAR) merupakan salah satu langkah antisipasi agar eksposur Risiko Operasional tidak sampai mengganggu permodalan.

Operational risk arising should be anticipated. Provision of capital held by bank is calculated based on minimum Capital Adequacy Ratio (CAR) which is one of anticipatory measures in order the operational risk exposure not interfere Bank's capital structure.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

46. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Operasional (lanjutan)

Dalam rangka menghitung kebutuhan modal minimum (CAR) untuk risiko operasional, Bank menerapkan Pendekatan Standar (*Standardized Approach*), sesuai Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.03/2020 tanggal 29 April 2020 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Operasional dengan Menggunakan Pendekatan Standar Bagi Bank Umum.

Dalam pemantauan risiko operasional, fungsi Internal Audit melaksanakan penilaian terhadap implementasi kebijakan dan prosedur manajemen risiko pada setiap aktivitas fungsional, produk atau layanan baru dan *Enterprise Risk Management Division* (ERMD) berfungsi memastikan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko berjalan dengan efektif pada setiap aktivitas fungsional, produk atau layanan baru.

Dalam rangka melakukan proses identifikasi risiko, saat ini Bank sedang mengembangkan aplikasi BTN *Loss Event Database* (BTN-LED). Aplikasi BTN LED ini dirancang terhubung dengan Kantor Wilayah dan Kantor Cabang. Dengan demikian Kantor Wilayah dan Kantor Cabang dapat secara periodik mengirimkan data *loss event* masing-masing kantor secara online melalui media web (*web based*).

Data yang terkumpul selanjutnya akan diolah dan dianalisis. Dari hasil pengolahan dan analisis tersebut diharapkan akan teridentifikasi peta eksposur risiko yang diperoleh, selanjutnya akan dilakukan langkah mitigasi terhadap eksposur risiko yang teridentifikasi tersebut.

Pengendalian dan mitigasi risiko operasional dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja Bank. *Enterprise Risk Management Division* bertugas untuk memastikan bahwa Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur pengendalian dan mitigasi risiko operasional yang memadai yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh setiap satuan kerja dalam melaksanakan transaksi dan aktivitas dengan akurat, efisien dan tepat waktu.

46. RISK MANAGEMENT (continued)

Operational Risk (continued)

In order to calculate the minimum Capital Adequacy Ratio (CAR) for operational risk, the Bank applies the Standardized Approach, in accordance with Financial Services Authority Circular Letter No. 6/SEOJK.03/2020 dated April 29, 2020 regarding the calculation of Risk Weighted Assets (RWA) for Operational Risk Calculated using Standardized Approach (SA).

In monitoring operational risk, Internal Audit performs an assessment of the implementation of risk management policies and procedures at each functional activity, product or new service and the ERMD also ensures that the identification, measurement, monitoring and risk control, work effectively on any functional activity, product or new services.

In order to make the process of identifying risks, the Bank is currently developing applications BTN Loss Event Database (BTN-LED). The application of LED was designed BTN connected with regional offices and branch offices. Thus, regional offices and branch offices can periodically send data loss event each office online through media web (web based).

The Data collected will be processed and analyzed. Processing and analysis of the results are expected to be identified as a risk exposure maps are obtained, further mitigation measures will be performed against the identified risk exposures.

Controlling and mitigating operational risk is conducted by risk taking units within the Bank. The Enterprise Risk Management Division ensures that the Bank has adequate policies and procedures, which must be complied and carried out by each risk taking unit in conducting its daily transactions and activities accurately, efficiently and in a timely manner.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

46. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Hukum

Pengukuran risiko hukum dilaksanakan oleh *Enterprise Risk Management Division* bersama-sama *Legal Division* berdasarkan laporan hasil evaluasi atas analisis kasus-kasus hukum secara individual terhadap liabilitas kontinjensi yang timbul dari tuntutan hukum yang terjadi.

Pemantauan risiko hukum dilaksanakan oleh *Legal Division* untuk mengevaluasi efektivitas dari implementasi kebijakan, prosedur dan kepatuhan terhadap kebijakan, regulasi hukum serta batas ketentuan Bank. Pemantauan dilaksanakan secara berkala terhadap seluruh posisi risiko hukum.

Dalam melaksanakan pengendalian risiko hukum, *Legal Division* memberi masukan hukum dan rekomendasi kepada setiap divisi dan satuan kerja serta melakukan *review* secara berkala terhadap perjanjian dan kontrak kerjasama dengan *counterparty*.

Risiko Reputasi

Identifikasi risiko reputasi dilakukan pada faktor-faktor risiko yang melekat pada aktivitas fungsional yang mencakup keterbukaan (*disclosure requirement*), keluhan nasabah terhadap pelayanan Bank, perilaku karyawan Bank dalam melayani nasabah dan sistem komunikasi Bank.

Pengukuran risiko reputasi dilakukan berdasarkan hasil *assessment* terhadap faktor-faktor risiko reputasi. Risiko reputasi Bank dikelola oleh *Corporate Secretary Division (CSD)* dan dilaporkan ke Bank Indonesia oleh *Customer Care Division (CCD)*.

Dalam rangka pemantauan risiko reputasi, dikembangkan aplikasi Sistem Pengaduan Nasabah (SPN) untuk mendukung layanan dan penanganan pengaduan nasabah yang memungkinkan proses penanganan pengaduan secara *online* antar pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan di Kantor Cabang dan Kantor Pusat. Hal ini berguna untuk memastikan terjaminnya kepuasan nasabah.

Dalam pengendalian risiko reputasi, satuan kerja yang berfungsi sebagai *corporate secretary* bertanggung jawab dalam penerapan kebijakan yang berkaitan dengan penanganan dan penyelesaian berita negatif atau menghindari informasi kontra produktif serta untuk menjalankan fungsi *Public Service Obligation (PSO)* dalam rangka melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*).

46. RISK MANAGEMENT (continued)

Legal Risk

Legal risk measurement is conducted together by Enterprise Risk Management Division and Legal Division based on the evaluation report resulting from the analysis of individual legal cases on contingent liabilities arising from legal litigation.

Legal risk monitoring is conducted by Legal Division to evaluate the effectiveness of policies, procedures and compliance with the Bank's policies and prevailing laws and regulations. Periodic monitoring is conducted on all legal risk exposures.

To mitigate legal risk, Legal Division provides legal advice and recommendation to each division and risk taking units and also conducts a regular review of agreements and partnership contracts with counterparty.

Reputational Risk

Reputational risk is identified an inherent risk factors associated to functional activities including disclosure requirements, customer complaints against the Bank, employee attitude when providing services to customers and the Bank's communication systems.

Reputation risk measurement is based on the results of assessment on the reputation risk factors. Bank reputation risk is managed by Corporate Secretary Division (CSD) and being reported to Bank Indonesia by Customer Care Division (CCD).

In order to monitor reputational risk, the Bank developed an application called Customer Complaint System (CCS) to support customer service and complaint handling that allows online complaints handling process between the parties related to the issues at branch offices and head office. This will be useful to ensure sustained customer satisfaction.

CSD is responsible for implementing policies related to managing and settling negative issues or avoiding counter-productive information and performs the Public Service Obligation (PSO) function in connection with carrying out corporate social responsibility.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

46. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Reputasi (lanjutan)

Kegiatan *Corporate Social Responsibility* tidak terfokus kepada kegiatan *charity* saja, tetapi juga dalam bentuk program yang berkesinambungan. Hal ini dapat diwujudkan dalam bentuk pemberian kredit subsidi dan pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

Risiko Strategik

Risiko Strategik merupakan risiko akibat ketidaktepatan Bank dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Identifikasi risiko strategik dilakukan berdasarkan atas faktor-faktor risiko strategik pada aktivitas fungsional tertentu, seperti aktivitas perkreditan, treasuri dan investasi, serta operasional dan jasa melalui *business plan* yang disusun oleh *Corporate Strategy and Planning Division* (CSPD) sebagaimana yang dijabarkan dalam Kebijakan Umum Direksi (KUD).

Pengukuran Risiko Strategik dan parameter pengukurannya dilakukan berdasarkan kinerja Bank yaitu dengan membandingkan hasil aktual dengan target yang telah ditetapkan. Pemantauan risiko strategik dilakukan oleh CSPD secara berkala dengan memonitor pencapaian *Key Performance Indicator* dan *risk exposure* dibandingkan dengan *risk appetite* bank.

Selanjutnya, Dewan Komisaris, Direksi, Divisi dan Kantor Cabang mereviu strategi dasar yang fokus pada perubahan-perubahan antara lain struktur organisasi Bank, perkreditan komersial, pembiayaan perdagangan, treasuri, operasional dan kekuatan serta kelemahan sistem teknologi informasi.

Dalam pengendalian risiko strategik, *Corporate Strategy and Planning Division* (CSPD) berfungsi menganalisa laporan aktual dan target rencana bisnis dan menyampaikannya kepada Direksi secara berkala.

Risiko Kepatuhan

Risiko Kepatuhan merupakan risiko yang timbul akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Dalam mengidentifikasi risiko kepatuhan, *Compliance Division* (CMGD) melakukan kajian terkait dengan eksposur Risiko Kepatuhan terhadap ketentuan eksternal yang melekat pada ketentuan internal. Di samping itu, CMGD menganalisis kejadian yang menyebabkan timbulnya risiko kepatuhan dan menginformasikan hal tersebut ke ERMD dan RMC untuk direviu.

46. RISK MANAGEMENT (continued)

Reputational Risk (continued)

Corporate Social Responsibility is not focused only on *charity*, but also in the form of a sustainable program. This can be realized in the form of credit subsidies and implementation of the Social and Environmental Responsibility Program (SERP).

Strategic Risk

Strategic risk is the risk arising from the inaccuracies in the decision making and/or the execution of a strategic decision and failure to anticipate changes in the business environment. Strategic Risk identification is based on the strategic risk factors on specific functional activities, such as lending, treasury and investment activities, as well as operations and services through a business plan prepared by the Corporate Strategy and Planning Division (CSPD) as elaborated in the General Policy of the BOD.

Strategic risk and parameter measurement are based on the Bank's performance by comparing actual results with targets that have been set. Strategic risk monitoring is carried out by CSPD periodically to monitor the achievement of Key Performance Indicator and risk exposure compared to the Bank's risk appetite.

Furthermore, the BOC, BOD, Divisions and Branch Offices are reviewing the basic strategy that focuses on changes in among others, the organizational structure of the Bank, commercial lending, trade finance, treasury, operations and the strengths and weaknesses of information technology systems.

In controlling strategic risk, the Corporate Strategy and Planning Division (CSPD) analyzes actual results against target and periodically reports to the BOD.

Compliance Risk

Compliance risk is the risk arising from the Bank's inability to comply and/or carry out laws and regulations. In identifying compliance risks, Compliance Division (CMGD) conducts a review regarding compliance risk associated with exposure to external provision inherent in internal regulations. In addition, CMGD analyzes the events that led to the emergence of risk, which are reported to and reviewed by ERMD and RMC.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

46. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

Risiko Kepatuhan (lanjutan)

Dalam rangka meminimalkan timbulnya Risiko Kepatuhan, *Legal Division* (LGD) telah menyediakan portal khusus yang bernama *Legal Application System* (LAPS) untuk memudahkan seluruh unit bisnis melakukan akses terhadap ketentuan internal Bank. Di samping itu, *Compliance Division* melakukan monitoring terhadap kejadian-kejadian yang menyebabkan timbulnya risiko kepatuhan dan menginformasikan hal tersebut ke ERMD.

Pengukuran risiko kepatuhan dilakukan untuk mengukur potensi kerugian yang disebabkan oleh ketidakpatuhan dan ketidakmampuan Bank dalam memenuhi ketentuan yang berlaku. Besarnya risiko kepatuhan diestimasi berdasarkan kemampuan Bank untuk memenuhi seluruh peraturan pada waktu yang lampau dan yang akan datang. Kegiatan-kegiatan ini termasuk mereviu semua penalti, litigasi, dan keluhan yang pernah diterima Bank.

Dalam pemantauan risiko kepatuhan, ERMD dan CMGD bertugas untuk mengevaluasi efektivitas implementasi manajemen risiko dengan memantau secara berkala seluruh jenis kegiatan yang berpotensi menimbulkan risiko kepatuhan.

Secara berkala, IAD melakukan pemantauan terhadap hasil tindak lanjut audit baik dari intern maupun ekstern.

47. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN

Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan antara nilai tercatat dan nilai wajar dari semua aset dan liabilitas keuangan. Nilai wajar yang diungkapkan adalah berdasarkan informasi relevan yang tersedia pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, dan tidak diperbaharui untuk mencerminkan perubahan dalam kondisi pasar yang telah terjadi setelah tanggal ini.

46. RISK MANAGEMENT (continued)

Compliance Risk (continued)

In order to minimize the Compliance Risk, *Legal Division* (LGD) has provided a special access called *Legal Application System* (LAPS) for easy access to the internal regulations of the Bank for the entire business units. In addition, *CMGD* monitors the events that contributed to compliance risk and reports these matters to ERMD.

Compliance risk is assessed by measuring the potential loss caused by the Bank's non-compliance or inability to comply with prevailing regulations. The level of compliance risk is estimated based on the Bank's ability to comply with prevailing and upcoming regulations. These activities include reviewing all penalties, litigations and complaints received by the Bank.

In monitoring compliance risk, ERMD and CMGD are responsible to evaluate the effectiveness of the implementation of risk management by monitoring regularly all kinds of activities that could potentially pose a compliance risk.

Periodically, IAD monitors and follow-up results of both internal and external audits.

47. FAIR VALUE OF FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES

The table below summarizes the comparison between the carrying amounts and fair values of all financial assets and liabilities of the Bank. The fair values disclosed are based on relevant information available as of December 31, 2023 and 2022 and are not updated to reflect changes in market conditions which have occurred after these dates.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

47. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan)

47. FAIR VALUE OF FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES (continued)

	31 Desember/December 31, 2023		31 Desember/December 31, 2022		
	Nilai Tercatat/ Carrying Value	Nilai wajar/ Fair value	Nilai Tercatat/ Carrying Value	Nilai wajar/ Fair value	
<u>Aset Keuangan</u>					<u>Financial Assets</u>
Kas	2.127.489	2.127.489	1.661.533	1.661.533	Cash
Nilai wajar melalui laba rugi					Fair value through profit or loss
Efek-efek	1.042.013	1.042.013	793.831	793.831	Securities
Obligasi Pemerintah	3.796.440	3.796.440	19.591.199	19.591.199	Government bonds
Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain					Financial asset held at fair value through other comprehensive income
Efek-efek	1.928.336	1.928.336	655.293	655.293	Securities
Obligasi Pemerintah	12.511.991	12.511.991	14.332.949	14.332.949	Government bonds
Diukur pada biaya perolehan amortisasi					Amortized cost
Efek-efek	2.335.524	2.338.545	271.645	280.451	Securities
Obligasi pemerintah	19.585.498	19.502.452	18.040.825	17.945.001	Government bonds
Efek-efek yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali	-	-	1.434.190	1.434.190	Securities purchased under agreement to resell
Tagihan derivatif	32.176	32.176	103.939	103.939	Derivative receivable
Tagihan Akseptasi	544.567	544.567	420.426	420.426	Acceptance Receivable
Giro pada Bank Indonesia	18.145.761	18.145.761	25.416.941	25.416.941	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	2.201.594	2.201.594	1.470.510	1.470.510	Current accounts with other Bank
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain	30.561.122	30.561.122	12.975.955	12.975.955	Placements with Bank Indonesia and other Banks
Kredit yang diberikan dan Piutang Syariah					Loans and sharia financing/receivables
Konsumsi					Consumer
Pemilikan rumah	251.160.354	246.332.418	227.522.319	225.618.498	Housing loan
Non-kepemilikan Rumah	12.726.250	12.726.250	11.425.286	11.425.286	Non-housing loan
Modal kerja	31.192.994	31.192.994	26.965.038	26.965.038	Working capital
Investasi	13.956.609	13.956.609	10.117.008	10.117.008	Investment
Sindikasi	7.127.988	7.127.988	4.488.751	4.488.751	Syndicated
Direksi dan karyawan	1.941.982	1.941.982	2.088.379	2.088.379	Directors and employees
Bunga yang masih akan diterima	11.526.687	11.526.687	10.750.302	10.750.302	Interest receivable
Aset lain-lain ^{*)}	1.873.496	1.873.496	1.040.048	1.040.048	Other assets ^{*)}
Total aset keuangan	426.318.871	421.410.910	391.566.367	389.575.528	Total financial assets
<u>Liabilitas Keuangan</u>					<u>Financial Liabilities</u>
Nilai wajar melalui laba rugi					Fair value through profit or loss
Liabilitas segera ^{**)}	2.567.271	2.567.271	2.611.027	2.611.027	Current liabilities ^{**)}
Simpanan nasabah					Deposits from customers
Giro	142.808.756	142.808.756	113.525.727	113.525.727	Demand deposits
Tabungan	38.998.753	38.998.753	37.376.047	37.376.047	Savings deposits
Deposito Berjangka	140.693.639	140.693.639	146.198.027	146.198.027	Time deposits
Simpanan dari Bank Lain					Deposits from other banks
Giro	91.312	91.312	136.408	136.408	Demand deposits
Deposito Berjangka	-	-	-	-	Time deposits
Surat berharga yang Diterbitkan	8.272.098	8.387.536	8.652.260	8.828.249	Securities issued
Liabilitas akseptasi	544.567	544.567	420.562	420.562	Acceptance Payable
Pinjaman yang diterima	33.762.089	31.075.777	24.821.005	21.731.531	Fund Borrowings
Bunga yang masih harus dibayar	647.496	647.496	629.366	600.410	Interest payables
Liabilitas lain-lain ^{***)}	521.548	521.548	4.690.821	4.690.821	Other liabilities ^{***)}
Pinjaman Subordinasi dan efek-efek subordinasi	9.112.837	9.006.404	9.158.219	8.899.563	Subordinated Loan and securities
Total liabilitas keuangan	378.020.366	375.343.059	348.219.469	345.018.372	Total financial liabilities

^{*)} Terdiri dari tagihan pihak ketiga.

^{**)} Terdiri dari kewajiban kepada pihak ketiga, bagi hasil yang belum dibagikan, deposito berjangka jatuh tempo dan bunga atas deposito berjangka namun belum diambil nasabah.

^{***)} Terdiri atas setoran jaminan dan dana jaminan pengembang (kewajiban kepada pihak ketiga).

^{*)} Consists of third party receivables.

^{**)} Consists of third party payables, undistributed profit sharing, matured time deposits and interest on time deposits not collected by customers.

^{***)} Consists of guarantee deposits and developers' security deposits (liabilities to third party).

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

47. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan)

Tabel di bawah ini menyajikan instrumen keuangan yang diakui pada nilai wajar berdasarkan hirarki yang digunakan Bank untuk menentukan dan mengungkapkan nilai wajar dari instrumen keuangan:

- (i) Tingkat 1: harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses pada tanggal pengukuran;
- (ii) Tingkat 2: input selain harga kuotasian yang termasuk dalam level 1 yang dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas, baik secara langsung atau tidak langsung;
- (iii) Tingkat 3: input yang tidak dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas.

47. FAIR VALUE OF FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES (continued)

The tables below show the financial instruments recognized at fair value based on the hierarchy used by the Bank in determining and disclosing the fair value of financial instruments:

- (i) Level 1: quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities which are accessible at the measurement date;
- (ii) Level 2: inputs other than quoted prices included in level 1 that are observable for the assets and liabilities, either directly or indirectly;
- (iii) Level 3: inputs that are not observable for the assets and liabilities.

31 Desember/December 31, 2023					
	Nilai Wajar/ Fair Value	Tingkat/ Level 1	Tingkat/ Level 2	Tingkat/ Level 3	
Aset Keuangan					Financial Assets
Nilai wajar melalui laba rugi					Fair value through profit or loss
Efek-efek	1.042.013	501.570	540.443	-	Securities
Obligasi pemerintah	3.796.440	3.796.440	-	-	Government bonds
Total nilai wajar laba rugi	4.838.453	4.298.010	540.443	-	Total fair value through profit or loss
Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain					Financial asset held at fair value through other comprehensive income
Efek-efek	1.928.336	1.928.336	-	-	Securities
Obligasi pemerintah	12.511.991	12.511.991	-	-	Government bonds
Total Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	14.440.327	14.440.327	-	-	Total financial asset held at fair value through other comprehensive income
Diukur pada biaya perolehan amortisasi					Amortized cost
Efek-efek	2.338.545	228.097	1.465.771	644.677	Securities
Obligasi pemerintah	19.502.452	19.502.452	-	-	Government bonds
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	-	-	-	-	Securities purchased under agreement to resell
Total diukur pada biaya perolehan amortisasi	21.840.997	19.730.549	1.465.771	644.677	Total Amortized cost
Tagihan Derivatif	32.176	-	32.176	-	Derivative Receivable
Kredit yang diberikan dan piutang					Loan and receivables
Kredit yang diberikan, piutang dan pembiayaan Syariah - Net	313.278.241	-	304.624.202	8.654.039	Loan and sharia financing receivables
Liabilitas Keuangan					Financial Liabilities
Liabilitas Derivatif	-	-	-	-	Derivative payable
Surat berharga yang diterbitkan	8.387.536	-	8.387.536	-	Securities issued
Pinjaman yang diterima	31.075.777	-	31.075.777	-	Fund borrowing
Pinjaman subordinasi dan efek-efek subordinasi	9.006.404	-	9.006.404	-	Subordinated loan and securities

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

47. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan)

Tabel di bawah ini menyajikan instrumen keuangan yang diakui pada nilai wajar berdasarkan hirarki yang digunakan Bank untuk menentukan dan mengungkapkan nilai wajar dari instrumen keuangan: (lanjutan)

47. FAIR VALUE OF FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES (continued)

The tables below show the financial instruments recognized at fair value based on the hierarchy used by the Bank in determining and disclosing the fair value of financial instruments: (continued)

31 Desember/December 31, 2022					
	Nilai Wajar/ Fair Value	Tingkat/ Level 1	Tingkat/ Level 2	Tingkat/ Level 3	
Aset Keuangan					Financial Assets
Nilai wajar melalui laba rugi					Fair value through profit or loss
Efek-efek	793.831	301.416	492.415	-	Securities
Obligasi pemerintah	19.591.199	19.591.199	-	-	Government bonds
Total nilai wajar laba rugi	20.385.030	19.892.615	492.415	-	Total fair value through profit or loss
Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain					Financial asset held at fair value through other comprehensive income
Efek-efek	655.293	655.293	-	-	Securities
Obligasi pemerintah	14.332.949	14.332.949	-	-	Government bonds
Total Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	14.988.242	14.988.242	-	-	Total financial asset held at fair value through other comprehensive income
Diukur pada biaya perolehan amortisasi					Amortized cost
Efek-efek	280.451	280.451	-	-	Securities
Obligasi pemerintah	17.945.001	17.945.001	-	-	Government bonds
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	1.434.190	1.434.190	-	-	Securities purchased under agreement to resell
Total diukur pada biaya perolehan amortisasi	19.659.642	19.659.642	-	-	Total Amortized cost
Tagihan Derivatif	103.939	-	103.939	-	Derivative Receivable
Kredit yang diberikan dan piutang					Loan and receivables
Kredit yang diberikan, piutang dan pembiayaan Syariah - Net	280.702.960	-	273.798.185	6.904.775	Loan and sharia financing receivables
Liabilitas Keuangan					Financial Liabilities
Liabilitas Derivatif	-	-	-	-	Derivative payable
Surat berharga yang diterbitkan	8.828.249	-	8.828.249	-	Securities issued
Pinjaman yang diterima	21.731.531	-	21.731.531	-	Fund borrowing
Pinjaman subordinasi dan efek-efek subordinasi	8.899.563	-	8.899.563	-	Subordinated loan and securities

- a. Nilai wajar aset dan kewajiban keuangan tertentu, kecuali efek-efek dan Obligasi Pemerintah yang dimiliki hingga jatuh tempo, kredit yang diberikan, pinjaman yang diterima, dan surat berharga yang diterbitkan, mendekati nilai tercatatnya karena mempunyai jangka waktu jatuh tempo yang singkat.

Estimasi nilai wajar terhadap aset keuangan tertentu ditetapkan berdasarkan diskonto arus kas dengan menggunakan suku bunga pasar uang yang berlaku untuk utang dengan risiko kredit dan sisa jatuh tempo yang serupa.

- a. The fair values of certain financial assets and liabilities, except for securities and Government Bonds classified as held to maturity, loans, fund borrowings, and marketable securities issued approximate to their carrying values due to their short-term maturities.

The estimated fair values of certain financial assets are determined based on discounted cash flows using money market interest rates for debt instruments with similar credit risk and remaining maturities.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

47. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan)

Estimasi nilai wajar terhadap kewajiban keuangan tertentu yang tidak memiliki kuotasi di pasar aktif ditetapkan berdasarkan diskonto arus kas dengan menggunakan suku bunga utang baru dengan sisa jatuh tempo yang serupa.

b. Kredit yang diberikan

Portofolio kredit Bank secara umum terdiri dari kredit yang diberikan dengan suku bunga mengambang dan kredit yang diberikan dengan jangka pendek dengan suku bunga tetap. Kredit yang diberikan dinyatakan berdasarkan *amortized cost*. Nilai wajar dari kredit yang diberikan menunjukkan nilai diskon dari perkiraan arus kas masa depan yang diharapkan akan diterima oleh Bank dengan menggunakan suku bunga pasar saat ini.

Nilai tercatat dari kredit yang diberikan dengan suku bunga mengambang dan nilai tercatat atas kredit jangka pendek dengan suku bunga tetap adalah perkiraan yang layak atas nilai wajar.

c. Efek-efek dan Obligasi pemerintah

Nilai wajar untuk surat-surat berharga dan Obligasi pemerintah yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi ditetapkan berdasarkan harga pasar atau harga kuotasi perantara (broker)/ pedagang efek (*dealer*). Jika informasi ini tidak tersedia, nilai wajar diestimasi dengan menggunakan harga pasar kuotasi efek yang memiliki karakteristik kredit, jatuh tempo dan *yield* yang serupa atau dinilai dengan menggunakan metode penilaian internal.

d. Surat-surat berharga yang diterbitkan, pinjaman yang diterima dan pinjaman subordinasi dan efek-efek subordinasi

Nilai wajar agregat berdasarkan model diskonto arus kas menggunakan tingkat suku bunga pasar untuk sisa periode jatuh temponya.

47. FAIR VALUE OF FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES (continued)

The estimated fair values of certain financial obligations which are not quoted in an active market are determined based on discounted cash flows using interest rates of instruments with similar remaining maturities.

b. Loans

Generally, the Bank's loan portfolio consists of loans with variable interest rate and short-term loans with fixed interest rate. Loans are stated at amortized cost. The estimated fair value of loans represents the discounted amount of estimated future cash flows expected to be received by the Bank using the current market rates.

The carrying amounts of variable rate loans and short-term fixed rate loans are the reasonable approximation of their fair values.

c. Securities and Government bonds

The fair values of amortized cost marketable securities and Government bonds are based on the market prices or broker/dealer price quotations. When this information is not available, the fair value is estimated using quoted market prices for securities with similar credit, maturity and yield characteristics or using internal valuation model.

d. Securities issued, fund borrowings and subordinated loan and securities

The aggregate fair values are based on discounted cash flow model using current market rate for the remaining term to maturity.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

48. LABA PER SAHAM

Rekonsiliasi faktor-faktor penentu perhitungan laba per saham dasar untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2023		
(i) Laba tahun berjalan	3.500.988	(a)	Income for the year (i)
(ii) Rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar	14.022	(b)	Weighted average (ii) number of shares outstanding
(iii) Laba per saham dasar	249	(a/b)	Basic earnings per share (iii)
	31 Desember/ December 31, 2022		
(i) Laba tahun berjalan	3.045.073	(a)	Income for the year (i)
(ii) Rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar	10.590	(b)	Weighted average (ii) number of shares outstanding
(iii) Laba per saham dasar	288	(a/b)	Basic earnings per share (iii)

49. PERJANJIAN DAN KONTINJENSI SIGNIFIKAN

a. Perjanjian Signifikan

Pada tanggal 4 Desember 2023, Bank mengadakan perjanjian dengan PT Sinergy Informasi Pratama sehubungan dengan Pengadaan *Cash Recycle Machine* (CRM) Tahun 2023 dengan nilai kontrak sebesar Rp133.863.

Pada tanggal 19 Desember 2023, Bank mengadakan perjanjian dengan PT Multipolar Technology Tbk sehubungan dengan Pengadaan Ulang PC *Desktop* dan *Notebook* Bank BTN dengan Skema *Seat Management* dengan nilai kontrak sebesar Rp115.980.

Pada tanggal 8 Februari 2023, Bank mengadakan perjanjian dengan PT Multipolar Technology sehubungan dengan pengadaan peremajaan perangkat *network* dan standarisasi LAN Menara Bank BTN dengan nilai kontrak Rp39.575.

Pada tanggal 3 Februari 2023, Bank mengadakan perjanjian dengan PT Binayasa Putra Batara sehubungan dengan Jasa Kontraktor Pekerjaan Pembangunan KC Cirebon dengan nilai kontrak Rp39.100.

Pada tanggal 20 Februari 2023, Bank mengadakan perjanjian dengan PT Trees Solutions sehubungan dengan pengadaan ulang *Integrated End to End Procurement* dengan nilai kontrak Rp30.669.

49. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND CONTINGENCIES

a. Significant Agreements

On December 4, 2023, Bank signed an agreement with PT Sinergy Information Pratama in relation to procurement of *Cash Recycle Machine* (CRM) 2023 with contract value of Rp133,863.

On December 19, 2023, Bank signed an agreement with PT Multipolar Technology Tbk in relation to re-procurement of PC *Desktop* and *Notebook* with *Seat Management* Scheme with contract value of Rp115,980.

On February 8, 2023, Bank signed an agreement with PT Multipolar Technology in connection with the procurement of *network equipment upgrades* and *standardization* of Bank BTN Tower LAN with a contract value of Rp39,575.

On February 3, 2023, Bank signed an agreement with PT Binayasa Putra Batara in relation to contractor services of construction for the Bank BTN KC Cirebon Building with contract value of Rp39,100.

On February 20, 2023, Bank signed an agreement with PT Trees Solutions in connection with the re-procurement of *Integrated End to End Procurement* with a contract value of Rp30,669.

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**49. PERJANJIAN DAN KONTINJENSI SIGNIFIKAN
(LANJUTAN)**

**49. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND
CONTINGENCIES (CONTINUED)**

a. Perjanjian Signifikan (lanjutan)

a. Significant Agreements (continued)

Pada tanggal 6 Januari 2023, Bank mengadakan perjanjian dengan PT Binayasa Putra Batara sehubungan dengan Jasa kontraktor pekerjaan renovasi Gedung Pusdiklat Bank BTN Tanah Abang dengan nilai kontrak sebesar Rp30.500.

On January 6, 2023, Bank signed an agreement with PT Binayasa Putra Batara in relation to contractor services of renovation for the Bank BTN Tanah Abang Pusdiklat Building with contract value of Rp30,500.

Pada tanggal 11 Juli 2023, Bank mengadakan perjanjian dengan PT Berkat Manunggal Energi sehubungan dengan pengadaan penggantian genset Gedung Menara BTN dengan nilai kontrak Rp 13.986.

On July 11, 2023, Bank signed an agreement with PT Berkat Manunggal Energi regarding the procurement of generator replacement for the BTN Tower Building with a contract value of Rp 13,986.

Pada tanggal 15 Maret 2023, Bank mengadakan perjanjian dengan PT Telekomunikasi Indonesia sehubungan dengan pengadaan perpanjangan sewa lokasi (*collocation*) Data Center Sentul tahun ketiga dengan nilai kontrak Rp10.638.

On March 15, 2023, Bank signed an agreement with PT Telekomunikasi Indonesia in connection with the procurement of a third year Sentul Data Center collocation lease with a contract value of Rp10,638.

Pada tanggal 16 Agustus 2023, Bank mengadakan perjanjian dengan PT Casa Prima Indonesia sehubungan dengan Jasa Kontraktor Renovasi Relokasi KC Kudus dengan nilai kontrak Rp7.495.

On August 16, 2023, Bank signed an agreement with PT Casa Prima Indonesia regarding the KC Kudus Relocation Renovation Contractor Services with a contract value of Rp 7,495.

Pada tanggal 4 September 2023, Bank mengadakan perjanjian dengan PT Casa Prima Indonesia sehubungan dengan Jasa Kontraktor Relay dan Pembangunan Gedung Sentralisasi Ruang Dokumen Pokok Banyumanik dengan nilai kontrak Rp7.400.

On September 4, 2023, Bank signed an agreement with PT Casa Prima Indonesia regarding Relay Contractor Services and Construction of the Banyumanik Main Document Room Centralized Building with a contract value of Rp7,400.

Pada tanggal 29 Agustus 2022, Bank mengadakan perjanjian dengan PT Surya Sudeco sehubungan dengan Pengadaan Sewa Mobil Operasional Bank BTN dengan nilai kontrak sebesar Rp77.830.

On August 29, 2022, Bank signed an agreement with PT Surya Sudeco in relation to procurement for Operational Car Lease with contract value of Rp77,830.

Pada tanggal 4 Agustus 2022, Bank mengadakan perjanjian dengan PT Mitra Integrasi Informatika sehubungan dengan Pengadaan Paket License Microsoft Dukungan dan Layanan Pendukung Data Center dengan nilai kontrak sebesar Rp47.990 untuk jangka waktu selama tiga tahun.

On August 4, 2022, Bank signed an agreement with PT Mitra Integrasi Informatika in relation to procurement for License Package Microsoft Support and Supporting Services for Data Center with contract value of Rp47,990 for three years.

Pada tanggal 22 Januari 2022, Bank mengadakan perjanjian dengan PT Swadharma Duta Data sehubungan dengan Pengadaan Perpanjangan Jasa Teknologi Informasi pada Outlet dengan nilai kontrak sebesar Rp27.663 untuk jangka waktu selama dua tahun dan pada tanggal 27 Februari 2023 merupakan perpanjangan tahun kedua dengan nilai kontrak Rp13.832.

On January 22, 2022, Bank signed an agreement with PT Swadharma Duta Data in relation to procurement for The Extension of Information Technology Service in Outlet with contract value of Rp27,663 for a period of two years and on February 27, 2023 was a second year IT outlet service extension with a contract value of Rp13,832.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

49. PERJANJIAN DAN KONTINJENSI SIGNIFIKAN (LANJUTAN)

49. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND CONTINGENCIES (CONTINUED)

a. Perjanjian Signifikan (lanjutan)

a. Significant Agreements (continued)

Pada tanggal 14 November 2022, Bank mengadakan perjanjian dengan PT Pesona Adi Batara sehubungan dengan Pengadaan Mobil operasional pejabat BTN tahun 2022 dengan nilai kontrak sebesar Rp21.500.

On November 14, 2022, Bank signed an agreement with PT Pesona Adi Batara in relation to Procurement of operational cars for BTN officials in 2022 with contract value of Rp21,500.

Pada tanggal 20 Desember 2022, Bank mengadakan perjanjian dengan PT Dana Pensiun Bank BTN sehubungan dengan perpanjangan sewa gedung graha exitama lantai 2 sampai dengan 5 (*Learning Center* Tebet) sebesar Rp18.204.

On December 20, 2022, Bank signed an agreement with PT Dana Pensiun Bank BTN in relation to Procurement extension of the lease for the 2nd floor until 5th floor of the Graha Extama building (Tebet Learning Center) with contract value of Rp18,204.

Pada tanggal 2 November 2022, Bank mengadakan perjanjian dengan PT Binayasa Putra Batara sehubungan dengan Jasa kontraktor renovasi lantai 6 Menara BTN dengan nilai kontrak sebesar Rp17.500.

On November 2, 2022, Bank signed an agreement with PT Binayasa Putra Batara in relation to contractor services of renovation for the 6th floor of BTN building with contract value of Rp17,500.

Pada tanggal 27 Mei 2022, Bank mengadakan perjanjian dengan PT Simian Solutions sehubungan dengan Pengadaan Pelaksana Sistem *Custodian Service* dengan nilai kontrak sebesar Rp17.000.

On May 27, 2022, Bank signed an agreement with PT Simian Solutions in relation to procurement of Implementation of Custodian Service System with contract value of Rp17,000.

Pada ada tanggal 21 Juli 2022, Bank mengadakan perjanjian dengan PT Sinergy Informasi Pratama sehubungan dengan Pengadaan *Firewall* untuk WAN DC Sentul dan DC Surabaya dengan nilai kontrak sebesar Rp.11.550 untuk jangka waktu selama satu tahun.

On July 21, 2022, Bank signed an agreement with PT Sinergy Informasi Pratama in connection with the Procurement of Firewalls for WAN DC Sentul and DC Surabaya with a contract value of Rp.11,550 for a period of one year.

Pada tanggal 16 Maret 2022, Bank mengadakan perjanjian dengan PT Hartekprima Listrindo sehubungan dengan Pengadaan Genset Peruntukan RBB 2022 dan Kebutuhan Non RBB dengan nilai kontrak sebesar Rp10.823.

On March 16, 2022, Bank signed an agreement with PT Hartekprima Listrindo in relation to Procurement of Generator Set for RBB 2022 and non RBB needed with contract value of Rp10,823.

Pada tanggal 22 Juli 2022, Bank mengadakan perjanjian dengan PT Casa Prima Indonesia sehubungan dengan Pengadaan Jasa Kontraktor Renovasi KCS Makassar dengan nilai kontrak sebesar Rp9.850.

On July 22, 2022, Bank signed an agreement with PT Casa Prima Indonesia in relation to Procurement of KCS Makassar Renovation Contractor Services with contract value of Rp9,850.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

49. PERJANJIAN DAN KONTINJENSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

b. Liabilitas Kontinjensi

Dalam melakukan usahanya, Bank menghadapi berbagai perkara hukum dan tuntutan di mana Bank sebagai tergugat, terutama sehubungan dengan kepatuhan dengan kontrak. Walaupun belum ada kepastian yang jelas, Bank berpendapat bahwa berdasarkan informasi yang ada dan keputusan terakhir dari perkara bahwa tuntutan hukum ini tidak akan berdampak secara material pada operasi, posisi keuangan atau tingkat likuiditas Bank.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, Bank telah membentuk cadangan (disajikan dalam akun "Liabilitas Imbalan Kerja dan Lain-lain") untuk sejumlah tuntutan hukum yang belum diputuskan masing-masing adalah sebesar Rp95.209 dan Rp160.209.

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan yang dibentuk atas kemungkinan timbulnya kerugian akibat tuntutan hukum yang belum diputuskan atau masih dalam proses tersebut telah memadai.

49. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

b. Contingent Liabilities

In conducting its business, the Bank is a defendant with various litigation proceedings and legal claims mainly with respect to matters of contractual compliance. Although there is no clear assurance yet, the Bank believes that based on information currently available, the ultimate resolution of these legal proceedings and legal claims will not likely have a material effect on the operations, financial position or liquidity level of Bank

As of December 31, 2023 and 2022, Bank has established an allowance (included in "Employee Benefits and Other Liabilities") for several pending lawsuits filed against Bank amounted to Rp95,209 and Rp160,209.

Management believes that the allowance is adequate to cover possible losses arising from pending litigations or legal claims that are currently in progress.

50. PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN YANG DIKELUARKAN DAN DIREVISI

Amendemen dan Penyesuaian Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) baru yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) - Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), tetapi belum berlaku efektif untuk laporan keuangan selama tahun berjalan diungkapkan di bawah ini.

Bank bermaksud untuk menerapkan amendemen dan penyesuaian PSAK tersebut, jika dipandang relevan, saat telah menjadi efektif. Berlaku efektif setelah tanggal 1 Januari 2024:

- a. Amendemen PSAK No. 1, "Penyajian Laporan Keuangan" tentang liabilitas jangka panjang dengan konvenan. Penerapan amendemen tersebut berlaku efektif sejak 1 Januari 2024 sesuai dengan perubahan tanggal berlaku efektifnya Amendemen PSAK No. 1 tentang "Penyajian Laporan Keuangan" terkait "Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang" yang sebelumnya berlaku efektif sejak 1 Januari 2023 menjadi 1 Januari 2024.

50. REVISED AND ISSUED STATEMENTS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS

The amendments and adjustments to Statement of Financial Accounting Standards (SFAS) that have been approved by the Financial Accounting Standards Board (IFAS) - Indonesian Institute of Accountants (IAI), but have not been effective for financial statements during the year are disclosed below.

The Bank intends to implement the amendments and adjustments to the SFAS, if it is deemed relevant, when they become effective. Effective after January 1, 2024:

- a. Amendment of SFAS No. 1: "Presentation of Financial Statements" regarding long-term liabilities with the convention. The application of the amendment is effective from January 1, 2024, in accordance with the change in the effective date of Amendment of SFAS No. 1 regarding "Presentation of Financial Statements" related to "Classification of Liabilities as Short Term or Long Term" which was previously became effective from January 1, 2023, will become January 1, 2024.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

50. PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN YANG DIKELUARKAN DAN DIREVISI (lanjutan)

Amandemen dan Penyesuaian Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) baru yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) - Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), tetapi belum berlaku efektif untuk laporan keuangan selama tahun berjalan diungkapkan di bawah ini. (lanjutan)

Bank bermaksud untuk menerapkan amendemen dan penyesuaian PSAK tersebut, jika dipandang relevan, saat telah menjadi efektif. Berlaku efektif setelah tanggal 1 Januari 2024: (lanjutan)

- b. Amendemen PSAK No. 73, "Sewa" terkait liabilitas sewa dalam jual dan sewa-balik. Amendemen tersebut mengadopsi seluruh pengaturan dalam Amendemen IFRS 16 tentang "Lease" terkait "Lease Liability in a Sale and Leaseback". Penerapan amendemen ini dimulai untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2024 dan penerapan lebih dini diperkenankan.
- c. Amandemen PSAK No. 2 "Laporan Arus Kas" dan Amandemen PSAK No. 60 "Instrumen Keuangan: Pengungkapan tentang Pengaturan Pembiayaan Pemasok". Penerapan lebih dini diperkenankan.

Berlaku efektif setelah tanggal 1 Januari 2025:

- a. Amandemen PSAK No. 10 "Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing tentang Kekurangan Ketertukaran". Penerapan lebih dini diperkenankan.

Pada saat penerbitan laporan keuangan, Bank masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar revisi tersebut serta pengaruhnya pada laporan keuangan Bank.

50. REVISED AND ISSUED STATEMENTS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS (continued)

The amendments and adjustments to Statement of Financial Accounting Standards (SFAS) that have been approved by the Financial Accounting Standards Board (IFAS) - Indonesian Institute of Accountants (IAI), but have not been effective for financial statements during the year are disclosed below. (continued)

The Bank intends to implement the amendments and adjustments to the SFAS, if it is deemed relevant, when they become effective. Effective after January 1, 2024: (continued)

- b. Amendment of SFAS No. 73: "Lease" regarding liabilities in sale-and-leaseback transactions. The amendment adopts the entire provision in IFRS Amendment 16 on "Lease" regarding "Lease Liability in Sale and Leaseback". Application of this amendment commences for the period of the financial year beginning on or after January 1, 2024, and early adoption is permitted.
- c. Amendment to PSAK No. 2 "Cash Flow Statement" and Amendment to PSAK No. 60 "Financial Instruments: Disclosures about Supplier Financing Arrangements". Early application is permitted.

Effective after January 1, 2025:

- a. Amendment to PSAK No. 10 "The Effect of Changes in Foreign Exchange Rates on the Lack of Convertibility". Early application is permitted.

As at the authorization date of this financial statements, the Bank is still evaluating the potential impact of these revised standards to the Bank's financial statements.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

51. TAMBAHAN INFORMASI ARUS KAS

Perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan pada laporan arus kas adalah sebagai berikut:

	Arus Kas/Cash Flow					
	1 Januari/ January 1, 2023	Penerimaan/ Receipts	Pembayaran/ Payment	Perubahan Non-Kas/ Non-Cash Changes	31 Desember/ December 31, 2023	
Surat berharga yang diterbitkan	8.652.260	2.449.019	(2.769.764)	(59.417)	8.272.098	Securities issued Securities Sold
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	-	67.691.353	(67.766.743)	75.390	-	Under Repurchase Agreements
Pinjaman yang diterima	24.821.005	11.185.162	(2.187.576)	(56.502)	33.762.089	Fund Borrowings
Pinjaman Subordinasi dan efek-efek subordinasi	9.158.219	-	-	(45.382)	9.112.837	Subordinated loans and securities
Pembayaran Liabilitas Sewa	167.633	-	(81.973)	101.036	186.696	Payment of Lease liability
Total	42.799.117	81.325.534	(72.806.056)	15.125	51.333.720	Total

	Arus Kas/Cash Flow					
	1 Januari/ January 1, 2022	Penerimaan/ Receipts	Pembayaran/ Payment	Perubahan Non-Kas/ Non-Cash Changes	31 Desember/ December 31, 2022	
Surat Berharga yang Diterbitkan	12.371.708	1.541.330	(5.263.000)	2.222	8.652.260	Securities Issued Securities Sold
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	-	592.326	(592.326)	-	-	Under repurchase agreements
Pinjaman yang diterima	22.062.291	11.814.826	(9.095.884)	39.772	24.821.005	Fund borrowings
Pinjaman subordinasi dan efek-efek subordinasi	8.759.744	-	-	398.475	9.158.219	Subordinated loans and securities
Pembayaran liabilitas sewa	126.348	-	(84.983)	126.268	167.633	Payment of Lease liability
Total	43.320.091	13.948.482	(15.036.193)	566.737	42.799.117	Total

51. SUPPLEMENTARY CASH FLOW INFORMATION

Changes in liabilities arising from financing activities in the cash flow statement are as follows:

52. INFORMASI TAMBAHAN

- Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, rasio aset produktif yang diklasifikasikan *non-performing* terhadap jumlah aset produktif (*non-performing ratio*) masing-masing adalah sebesar 2,58% dan 2,74%.
- Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, rasio jumlah cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan yang telah dibentuk berdasarkan PSAK No. 71 terhadap jumlah minimum cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan masing-masing sebesar 121,99% dan 130,00%.

52. ADDITIONAL INFORMATION

- As of December 31, 2023 and 2022, the Bank's *non-performing assets to total earning assets (non-performing ratio)* are 2.58% and 2.74%, respectively.
- As of December 31, 2023 and 2022, the ratio of allowance for impairment losses on financial assets based on SFAS No. 71 to minimum allowance for impairment losses based on Financial Service Authority regulation is 121.99% and 130.00%, respectively.

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2023
and for the Year Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

52. INFORMASI TAMBAHAN (lanjutan)

c. Kegiatan Jasa Kustodian

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk menyelenggarakan Jasa Kustodian (bank kustodian) sejak tahun 2023 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-37/PM.2/2022 tanggal 17 November 2022.

Jasa kustodian yang diselenggarakan berada dibawah Divisi *Financial Institution and Capital Market*. Jasa yang diselenggarakan meliputi sebagai berikut :

- Jasa penyimpanan dan pengadministrasian (*safe keeping services*);
- Jasa Penyelesaian transaksi efek (*settlement handling*);
- Jasa pengurusan hak nasabah terkait dengan efek yang disimpan di kustodian (*corporate action*)
- Jasa perwalian/ mewakili nasabah untuk menghadiri dan meneruskan suara dalam RUPS, RUPSLB, RUPO (*proxy services*);
- Jasa Informasi dan pelaporan; (*Information & Reporting*, antara lain : *Portfolio Valuation Report, Settlement Report, Corporate Action Report*).
- Jasa *Custody* untuk kontrak pengelolaan dana, reksa dana yang diterbitkan oleh manajer investasi.

Aset milik nasabah yang diadministrasikan oleh kustodian BTN per 31 Desember 2023 sebesar ekuivalen Rp7.941.087 juta yang terdiri dari saham, surat berharga Negara (SBN), obligasi korporasi baik dalam mata uang rupiah maupun USD.

Asset yang diadministrasikan jasa kustodian tidak termasuk dalam laporan posisi keuangan.

52. ADDITIONAL INFORMATION (continued)

c. Custodian Services Activities

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk provides Custodian Services (custodian bank) since 2023 based on Decree of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority No. KEP-37/PM.2/2022 dated November 17, 2022.

Custodian services provided are under the Financial Institution and Capital Market Division. Services provided include the following:

- Storage and administration services (*safe keeping services*);
- Securities transaction settlement services (*Settlement Handling*);
- Customer rights management services related to securities held at the custodian (*corporate action*)
- Trustee services/representing customers to attend and transmit votes at the GMS, EGMS, RUPO (*proxy services*);
- Information and reporting services; (*Information & Reporting*, including: *Portfolio Valuation Report, Settlement Report, Corporate Action Report*).
- Custody services for fund management contracts, mutual funds issued by investment managers.

Customer-owned assets administered by BTN custodian as of December 31, 2023 amount to the equivalent of Rp7,941,087 million consisting of shares, government securities (SBN), corporate bonds both in rupiah and USD.

Assets administered by custodian services are not included in the consolidated statement of financial position.

53. PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN

Manajemen Bank bertanggung jawab penuh terhadap penyajian laporan keuangan terlampir yang diselesaikan dan disetujui untuk diterbitkan pada tanggal 12 Februari 2024.

53. COMPLETION OF THE FINANCIAL STATEMENTS

The management of the Bank is fully responsible for the preparation of the accompanying Financial Statements which were completed and authorized for issuance on February 12, 2024.

Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Laporan keuangan tanggal 31 Desember 2023
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
beserta laporan auditor independen

**SURAT PERNYATAAN PENGELOLA
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2023
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk**

Kami, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama	: Nixon L.P. Napitupulu
Alamat Kantor	: Jl. Gajah Mada No. 1, Jakarta 10130
Alamat domisili atau sesuai KTP	: Jl. Wijaya I No. 13 Kel. Petogogan, Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan
Nomor telepon	: 021-6346762
Jabatan	: Direktur Utama
2. Nama	: Hirwandi Gafar
Alamat Kantor	: Jl. Gajah Mada No. 1, Jakarta 10130
Alamat domisili atau sesuai KTP	: Taman Meruya Ilir Blok D12/86 Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan Jakarta Barat
Nomor telepon	: 021-6346764
Jabatan	: Direktur

menyatakan bahwa:

- Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk;
- Laporan keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia;
- Semua informasi dalam laporan keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk telah dimuat secara lengkap dan benar; dan
 - Laporan keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
- Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 12 Februari 2024

Nixon L.P. Napitupulu
Direktur Utama

Hirwandi Gafar
Direktur

**PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk
TANGGAL 31 DESEMBER 2023
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

Daftar Isi

	Halaman
Laporan auditor independen	
Laporan posisi keuangan.....	1
Laporan aktivitas	2
Laporan arus kas.....	3
Catatan atas laporan keuangan	4-13

Laporan Auditor Independen

Laporan No. 00047/2.1032/AU.2/10/1681-1/1/II/2024

**Pengelola Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.**

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. ("PUMK") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2023, serta laporan aktivitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PUMK tanggal 31 Desember 2023, serta aktivitas dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia.

Basis opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"). Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap PUMK berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini kami.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00047/2.1032/AU.2/10/1681-1/1/II/2024 (lanjutan)

Tanggung jawab manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terhadap laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan PUMK dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi PUMK atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan PUMK.

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor independen yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya suatu kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian atas pengendalian internal.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00047/2.1032/AU.2/10/1681-1/1/II/2024 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan (lanjutan)

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga (lanjutan):

- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal PUMK.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan PUMK untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor independen kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor independen kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan PUMK tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

KAP Purwantono, Sungkoro & Surja



Christophorus Alvin Kossim
Registrasi Akuntan Publik No. AP.1681

12 Februari 2024



PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 Desember 2023
(Disajikan dalam Rupiah)

	<u>Catatan</u>	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
ASET			
Kas dan Setara Kas	2b,2j,4,11	10.970.559.980	11.732.472.238
Piutang Pinjaman Mitra Binaan - neto (Setelah dikurangi Penyisihan Penurunan Nilai Piutang Pinjaman Sebesar Rp36.893.857.090 dan Rp33.795.371.727 Masing-masing Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan 2022)	2c,2e,5	12.428.254.008	21.809.469.160
Piutang Lain-lain	10,11	8.000.000.000	-
Piutang Jasa Administrasi Pinjaman	2d,6	123.380.251	85.576.298
JUMLAH ASET		<u>31.522.194.239</u>	<u>33.627.517.696</u>
 ASET NETO			
Aset Neto Tidak Terikat	2f,7	<u>31.522.194.239</u>	<u>33.627.517.696</u>
JUMLAH LIABILITAS DAN ASET NETO		<u>31.522.194.239</u>	<u>33.627.517.696</u>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk
LAPORAN AKTIVITAS
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2023
(Disajikan dalam Rupiah)

		Tahun yang berakhir pada tanggal	
	Catatan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
PERUBAHAN ASET NETO TIDAK TERIKAT			
PENDAPATAN			
Pendapatan Jasa Administrasi Pinjaman	2g,8	1.065.855.899	1.088.645.050
Pendapatan Lain-Lain	2h,9	2.744.099	1.932.666
		1.068.599.998	1.090.577.716
BEBAN			
Beban Penyisihan Penurunan Nilai Piutang Pinjaman	2i,5c	(3.098.485.363)	(1.312.513.787)
Beban lain-lain		(75.438.092)	-
		(3.173.923.455)	(1.312.513.787)
KENAIKAN (PENURUNAN) ASET NETO TIDAK TERIKAT		(2.105.323.457)	(221.936.071)
ASET NETO PADA AWAL TAHUN		33.627.517.696	33.849.453.767
ASET NETO PADA AKHIR TAHUN		31.522.194.239	33.627.517.696

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2023
(Disajikan dalam Rupiah)

		Tahun yang berakhir pada tanggal	
	Catatan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Pencairan Pinjaman Mitra Binaan		(9.161.600.000)	(18.386.450.000)
Pengalihan pengelolaan dana mitra binaan	10	(8.000.000.000)	-
Penerimaan Pokok Angsuran		15.264.329.788	13.799.087.350
Pendapatan Jasa Administrasi Pinjaman		1.132.613.855	1.063.597.362
Pendapatan Lain-Lain	9	2.744.099	1.932.666
Kas Neto Yang Digunakan untuk Aktivitas Operasi		(761.912.258)	(3.521.832.622)
(PENURUNAN) KENAIKAN NETO DALAM KAS DAN SETARA KAS		(761.912.258)	(3.521.832.622)
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN		11.732.472.238	15.254.304.860
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN		10.970.559.980	11.732.472.238

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah)

1. PENJELASAN UMUM

a. Pendirian dan Informasi Umum

Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara (Program TJSL BUMN), yang antara lain mengatur bahwa, sebagaimana disebut dalam Pasal 23 ayat (3), laporan keuangan dan pelaksanaan Program TJSL BUMN dilaporkan menjadi satu kesatuan dalam laporan berkala dan laporan tahunan kinerja BUMN Pembina.

Selain hal di atas, antara lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (4), untuk laporan keuangan dan pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil tahunan tetap dilaporkan tersendiri dan harus diaudit oleh Kantor Akuntan Publik secara terpisah dari audit laporan keuangan BUMN Pembina.

Definisi Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil mengacu kepada peraturan Menteri No. PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara (Program TJSL BUMN) dan ketentuan-ketentuan peraturan pelaksanaannya adalah tentang Program Pendanaan UMK yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana BUMN.

b. Kegiatan Utama

Kegiatan utama Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMK) adalah penyaluran pinjaman dan penyaluran dana pembinaan. Dana Program Pendanaan UMK kepada Mitra Binaan disalurkan dalam bentuk:

- a. Pinjaman untuk membiayai modal kerja dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan;
- b. Pinjaman khusus untuk membiayai kebutuhan yang bersifat jangka pendek dalam rangka memenuhi pesanan dari rekanan usaha mitra binaan;
- c. Beban pembinaan:
 - 1) Untuk membiayai pendidikan, pelatihan, penelitian, pemagangan, pemasaran, promosi, yang menyangkut peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kemampuan pengelolaan usahanya;
 - 2) Beban pembinaan hanya dapat diberikan kepada atau untuk kepentingan Mitra Binaan

c. Struktur Organisasi dan Susunan Pengelola

Susunan pengelola Program Pendanaan UMK BTN pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	2023	2022
Pembina	Nixon L.P. Napitupulu Hirwandi Gafar	Haru Koesmahargyo Hirwandi Gafar
Program Pendanaan UMK		
Pimpinan	Roganda S. Mangapul* Siahaan	Budi Permana
Pelaksana	Ardi Darmawan	Ardi Darmawan
Pelaksana	Mayang Shafira S**	Harry Kevinta J M*
Pelaksana	Diandary Denovari**	Rizqy El M
Pelaksana	-	Angga Dwi Yanuar Putra**

**PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah)**

1. PENJELASAN UMUM (lanjutan)

c. Struktur Organisasi dan Susunan Pengelola (lanjutan)

Tahun 2023

*) Menjadi Pimpinan Program Pendanaan UMK sejak November 2023

**) Menjadi Pelaksana Program Pendanaan UMK sejak Mei 2023

Tahun 2022

*) Menjadi Pelaksana Program Pendanaan sejak Januari 2022

**) Menjadi Pelaksana Program Pendanaan UMK s.d. Juli 2022

Mulai tahun 2021, struktur pengelola Program TJSL BUMN mengikuti peraturan terbaru dari Meneg BUMN No. PER-05/MBU/04/2021 dimana Program TJSL BUMN dilaporkan terpisah dan menjadi satu kesatuan dari laporan keuangan BUMN Pembina.

d. Ketentuan Program Pendanaan UMK Mengacu kepada Peraturan Meneg BUMN No. PER-1/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023

- 1) Program Pendanaan UMK adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha mikro dan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri
- 2) Dalam peraturan di atas diatur tentang kriteria usaha mikro dan usaha kecil yang berhak menjadi mitra binaan BUMN, antara lain, sebagai berikut:
 - i) dimiliki oleh warga negara Indonesia;
 - ii) belum memenuhi kriteria atau memiliki akses pinjaman kepada lembaga pendanaan atau perbankan;
 - iii) diutamakan usaha mikro dan usaha kecil dengan jenis usaha yang sejalan dengan bidang dan/atau mendukung bisnis BUMN;
 - iv) diutamakan usaha mikro dan usaha kecil yang berlokasi di wilayah kerja BUMN
 - v) berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi secara langsung maupun tidak langsung, dengan usaha menengah atau usaha besar;
 - vi) berbentuk usaha orang perseorangan dan/atau sekelompok orang, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum
 - vii) mempunyai potensi dan prospek usaha untuk dikembangkan.
- 3) Bentuk dan maksimum pendanaannya adalah sebagai berikut:
 - a. Pemberian modal kerja dalam bentuk pinjaman dan/atau pembiayaan syariah dengan jumlah pinjaman dan/atau pembiayaan syariah untuk setiap usaha mikro dan usaha kecil paling banyak Rp250.000.000.
 - b. Pendanaan tambahan dalam bentuk pinjaman dan/atau pembiayaan syariah untuk membiayai kebutuhan yang bersifat jangka pendek maksimal 1 tahun untuk memenuhi pesanan dari rekanan usaha mikro dan usaha kecil dengan jumlah paling banyak Rp100.000.000.
 - c. Modal kerja dalam bentuk pinjaman sebagaimana dimaksud pada huruf a dikenakan jasa administrasi sebesar:
 - 3% (tiga persen) efektif per tahun;
 - suku bunga flat (tetap) yang setara dengan 3% (tiga persen) efektif per tahun; atau
 - ketentuan lain yang ditetapkan Menteri,dengan jangka waktu/tenor pinjaman paling lama 3 (tiga) tahun.
 - d. Pembiayaan syariah sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan berdasarkan:
 - prinsip jual beli, maka proyeksi margin yang dihasilkan disetarakan dengan margin sebesar jasa administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2); atau
 - prinsip bagi hasil, maka rasio bagi hasil yang diterima BUMN mulai dari 10% (sepuluh persen) sampai dengan paling banyak 50% (lima puluh persen) berdasarkan perjanjian.

PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah)

1. PENJELASAN UMUM (lanjutan)

d. Ketentuan Program Pendanaan UMK Mengacu kepada Peraturan Meneg BUMN No. PER-1/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 (lanjutan)

4) Syarat dan kondisi:

Untuk tata cara penyaluran pinjaman dan/atau pembiayaan syariah dalam Program Pendanaan UMK diatur syarat dan kondisi yang harus dipenuhi calon usaha binaan, antara lain, harus menyampaikan rencana dan/atau proposal kegiatan usaha kepada BUMN Pembina yang nanti akan dilakukan seleksi dan evaluasi atas permohonan yang diajukan oleh calon usaha mikro dan usaha kecil.

BUMN Pembina yang nanti akan dilakukan seleksi dan evaluasi atas permohonan yang diajukan oleh calon usaha mikro dan usaha kecil.

Bagi calon binaan yang memenuhi syarat dan terpilih akan dibuatkan surat perjanjian dan/atau kontrak yang berisi syarat dan kondisi tentang hak dan kewajiban yang harus dipenuhi para pihak. Namun, sebelum dilakukan perjanjian, calon usaha mikro dan usaha kecil binaan tersebut harus terlebih dahulu menyelesaikan proses administrasi terkait dengan rencana pemberian modal kerja oleh perusahaan/BUMN bersangkutan.

5) Teknis pelaksanaan penyaluran Program Pendanaan UMK:

Dalam pelaksanaan penyaluran Program Pendanaan UMK, BUMN Pembina dapat bekerjasama dengan BUMN lain, Anak perusahaan BUMN atau Perusahaan terafiliasi BUMN yang memiliki bisnis sebagai lembaga pembiayaan dan perbankan atau memiliki kemampuan dalam menyalurkan pinjaman.

Ketentuan pelaksanaan kerja sama dimaksud di atas dituangkan dalam surat perjanjian dan/atau kontrak yang paling sedikit memuat hak dan kewajiban serta tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak.

6) Sumber dana Program TJSL BUMN berasal dari:

- i) anggaran kegiatan yang diperhitungkan sebagai biaya pada BUMN pembina dalam tahun anggaran berjalan;
- ii) penyisihan sebagian laba bersih BUMN Pembina pada tahun anggaran sebelumnya dan/atau;
- iii) sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7) Sumber dana untuk Program Pendanaan UMK, selain sumber dana sebagaimana dimaksud pada angka 6) di atas, dapat berasal dari:

- i) saldo dana Program Pendanaan UMK yang teralokasi sampai dengan akhir tahun 2015; dan/atau;
- ii) jasa administrasi pinjaman/margin/bagi hasil, bunga deposito dan/atau jasa giro dari dana Program Pendanaan UMK

8) Besaran dana Program TJSL BUMN sebagaimana dijelaskan pada angka 6.i) dan angka 6.ii) di atas, ditetapkan dalam rencana kerja anggaran perusahaan yang disahkan oleh RUPS/Menteri.

9) Pembebanan beban operasional Program TJSL BUMN:

- Pembebanan beban operasional Program TJSL BUMN menjadi beban BUMN Pembina.
- Pembebanan beban kepada usaha mikro dan usaha kecil menjadi bagian dari biaya Program TJSL BUMN.

**PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan - Ikatan Akuntan Indonesia dan mempertimbangkan Surat Edaran Kementerian BUMN No. SE-02/MBU/WK/2012 yang dikeluarkan tanggal 23 Februari 2012 perihal penetapan pedoman akuntansi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.

Laporan keuangan disusun menggunakan dasar akrual kecuali untuk Laporan Arus Kas disusun menggunakan dasar kas. Laporan Arus Kas menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas yang diklasifikasikan dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan yang disusun dengan menggunakan metode langsung (*direct method*). Tahun buku Program Pendanaan UMK BTN adalah 1 Januari sampai 31 Desember dan mata uang penyajian yang digunakan dalam laporan keuangan adalah Rupiah yang juga merupakan mata uang fungsional Program Pendanaan UMK BTN.

b. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas adalah saldo kas dan bank yang dapat dipergunakan secara bebas untuk membiayai kegiatan Program Pendanaan UMK tidak digunakan sebagai jaminan. Saldo kas dan setara kas dicatat sebesar nilai nominalnya.

c. Piutang Pinjaman Mitra Binaan

Piutang pinjaman mitra binaan adalah pinjaman yang disalurkan oleh PUMK kepada mitra binaan. Piutang pinjaman mitra binaan diakui pada saat pinjaman tersebut disalurkan kepada mitra binaan dan diukur serta dicatat sebesar jumlah neto setelah dikurangi dengan penyisihan kerugian penurunan nilai.

Penggolongan kualitas piutang pinjaman mitra binaan dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri BUMN serta dengan ketentuan sebagai berikut:

- i) lancar, dalam hal pembayaran angsuran pokok dan jasa administrasi pinjaman tepat waktu atau terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman paling lambat 30 hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama,
- ii) kurang lancar, dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 30 hari sampai dengan 180 hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama,
- iii) diragukan, dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 180 hari sampai dengan 270 hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama,
- iv) macet, dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 270 hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama.

**PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah)**

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

d. Piutang Jasa Administrasi Pinjaman

Piutang jasa administrasi pinjaman adalah jasa administrasi yang sudah menjadi hak Program Pendanaan UMK BTN pada akhir tahun namun belum diterima sampai akhir tahun. Piutang jasa administrasi pinjaman mitra binaan dicatat secara akrual mengikuti piutang pinjaman mitra binaan dengan kualitas pinjaman lancar dan kurang lancar. Apabila pinjaman mitra binaan memiliki kualitas pinjaman diragukan atau macet maka tidak dibentuk akrual atas piutang jasa administrasi pinjaman mitra binaan.

e. Penyisihan Penurunan Nilai Piutang Pinjaman

Penyisihan penurunan nilai piutang pinjaman adalah besarnya penyisihan atas piutang pinjaman yang mungkin tidak tertagih dihitung berdasarkan estimasi kerugian yang tidak dapat ditagih.

Penyisihan penurunan nilai piutang pinjaman diakui saat akhir periode akuntansi dan diukur dan dicatat sebesar estimasi kerugian yang tidak dapat ditagih. Penyisihan penurunan nilai piutang pinjaman dihitung secara kolektif berdasarkan persentase tertentu tingkat ketertagihan (*collection*) data historis yang ada.

f. Aset Neto

Aset neto adalah aset dikurangi dengan liabilitas. Aset neto diklasifikasikan menjadi Aset Neto Terikat (ANT) dan Aset Neto Tidak Terikat (ANTT).

ANT adalah sumber daya yang penggunaannya dibatasi untuk tujuan tertentu atau tidak dapat digunakan untuk kegiatan operasi normal. ANTT adalah sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu.

g. Pendapatan Jasa Administrasi Pinjaman

Pendapatan jasa administrasi pinjaman adalah pendapatan jasa yang dipungut atas pinjaman dana Program Pendanaan UMK yang disalurkan kepada mitra binaan. Akrual pendapatan jasa administrasi pinjaman diakui hanya untuk piutang dengan status lancar dan kurang lancar dan diukur serta dicatat berdasarkan nilai yang telah jatuh tempo sesuai dengan kontrak.

h. Pendapatan Lain-lain

Pendapatan lain-lain adalah pendapatan yang tidak dapat digolongkan menurut klasifikasi pendapatan yang telah disebutkan di atas dan diakui pada saat diterima. Pendapatan lain-lain diukur dan dicatat sebesar nilai yang diterima Program Pendanaan UMK BTN.

i. Beban (Pembalikan) Penyisihan Penurunan Nilai Piutang Pinjaman

Beban (pembalikan) penyisihan penurunan nilai piutang pinjaman adalah beban (pendapatan) yang timbul akibat pembentukan (pembalikan) penyisihan penurunan nilai atas piutang pinjaman yang mungkin tidak tertagih.

j. Transaksi dengan pihak berelasi

Program Pendanaan UMK BTN melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi seperti yang didefinisikan dalam SAK-ETAP tentang "Pengungkapan Pihak-Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa", yang didefinisikan antara lain:

- a. Pihak yang memiliki pengendalian, pengendalian bersama atau pengaruh signifikan atas entitas.
- b. Entitas anak, *joint venture*, entitas asosiasi dari entitas.
- c. Personel manajemen kunci dari entitas dan entitas induknya (secara agregat).
- d. Pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa lainnya.

PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah)

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI

a. Pertimbangan

Sesuai Peraturan Menteri BUMN, beban operasional Program Pendanaan UMK menjadi beban PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk selaku BUMN Pembina.

Mata uang fungsional Program Pendanaan UMK BTN adalah mata uang dari lingkungan ekonomi primer dimana Program Pendanaan UMK BTN beroperasi. Mata uang tersebut adalah mata uang yang mempengaruhi pendapatan dan beban dari jasa yang diberikan. Program Pendanaan UMK BTN menentukan bahwa mata uang fungsionalnya adalah Rupiah.

b. Estimasi dan asumsi

Setiap akhir periode pelaporan, Program Pendanaan UMK BTN menelaah penyisihan penurunan nilai secara kolektif terhadap risiko kredit mitra binaan yang dikelompokkan berdasarkan karakteristik kredit yang sama, yang meskipun tidak diidentifikasi secara spesifik memerlukan penyisihan tertentu, memiliki risiko yang lebih besar tidak tertagih dibandingkan dengan piutang yang diberikan kepada mitra binaan. Penyisihan kerugian penurunan nilai piutang pinjaman mitra binaan dihitung berdasarkan kajian nilai terkini dan historis tingkat ketertagihan dari piutang. Penyisihan piutang mitra binaan dihitung berdasarkan estimasi kerugian yang tidak dapat ditagih yaitu secara kolektif berdasarkan persentase tertentu tingkat ketertagihan (collection) data historis yang ada (minimal 2 tahun). Penyisihan ini disesuaikan secara berkala untuk mencerminkan hasil aktual dan estimasi.

4. KAS DAN SETARA KAS

Kas dan Setara Kas merupakan penempatan dana Program Pendanaan UMK pada rekening giro di PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk yang terdiri dari:

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Program Pendanaan UMK yaitu:		
- Rekening Giro Kantor Pusat	10.970.559.980	11.732.472.238
Jumlah Kas dan Setara Kas	10.970.559.980	11.732.472.238

5. PIUTANG PINJAMAN MITRA BINAAN

a. Rincian Piutang Pinjaman Mitra Binaan Berdasarkan Wilayah

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Wilayah 1 ^{*)}	6.682.610.608	7.196.558.033
Wilayah 2 ^{**)}	12.369.739.165	14.693.532.108
Wilayah 3 ^{***)}	8.602.090.487	9.275.498.642
Wilayah 4 ^{****)}	6.045.421.412	7.156.135.401
Wilayah 5 ^{*****)}	10.496.088.209	10.874.552.812
Wilayah 6 ^{*****)}	5.126.161.217	6.408.563.891
Jumlah Piutang Pinjaman	49.322.111.098	55.604.840.887
Dikurangi penyisihan penurunan nilai piutang pinjaman	(36.893.857.090)	(33.795.371.727)
Neto	12.428.254.008	21.809.469.160

PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah)

5. PIUTANG PINJAMAN MITRA BINAAN (lanjutan)

a. Rincian Piutang Pinjaman Mitra Binaan Berdasarkan Wilayah (lanjutan)

- *) Wilayah 1 terdiri dari kantor cabang pada wilayah Jawa Barat
 **) Wilayah 2 terdiri dari kantor cabang pada wilayah DKI Jakarta dan Banten
 ***) Wilayah 3 terdiri dari kantor cabang pada wilayah Jawa Timur, Bali, NTB dan NTT
 ****) Wilayah 4 terdiri dari kantor cabang pada wilayah Sumatera
 *****) Wilayah 5 terdiri dari kantor cabang pada wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua
 *****) Wilayah 6 terdiri dari kantor cabang pada wilayah D.I Yogyakarta dan Jawa Tengah

b. Rincian Piutang Pinjaman Mitra Binaan Berdasarkan Kualitas Pinjaman

31 Desember 2023			
	Saldo Piutang	Penyisihan Penurunan Nilai Piutang Pinjaman	Saldo Piutang - Neto
Lancar	3.452.460.063	181.806.639	3.270.653.424
Kurang lancar	7.303.272.049	1.845.261.632	5.458.010.417
Diragukan	4.950.359.453	1.250.769.286	3.699.590.167
Macet	33.616.019.533	33.616.019.533	-
Jumlah Piutang Pinjaman	49.322.111.098	36.893.857.090	12.428.254.008

31 Desember 2022			
	Saldo Piutang	Penyisihan Penurunan Nilai Piutang Pinjaman	Saldo Piutang - Neto
Lancar	18.257.799.973	995.218.754	17.262.581.219
Kurang lancar	4.535.941.159	1.201.796.907	3.334.144.252
Diragukan	1.649.878.829	437.135.140	1.212.743.689
Macet	31.161.220.926	31.161.220.926	-
Jumlah Piutang Pinjaman	55.604.840.887	33.795.371.727	21.809.469.160

c. Perubahan Penyisihan Penurunan Nilai Piutang Pinjaman

Perubahan penyisihan penurunan nilai piutang pinjaman kepada mitra binaan pada tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Saldo awal tahun	33.795.371.727	32.482.857.940
Beban cadangan penyisihan kerugian		
Penurunan nilai piutang pinjaman selama		
tahun berjalan	3.098.485.363	1.312.513.787
Saldo akhir tahun	36.893.857.090	33.795.371.727

Manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan penurunan nilai piutang yang telah dibentuk telah memadai untuk menutupi kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya piutang pinjaman mitra binaan.

PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah)

5. PIUTANG PINJAMAN MITRA BINAAN (lanjutan)

d. Rincian Piutang Pinjaman Mitra Binaan Berdasarkan Sektor Ekonomi

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Perdagangan	30.613.297.342	33.731.624.584
Jasa	6.898.450.548	9.285.064.565
Peternakan	4.100.803.786	4.612.130.235
Pertanian	3.487.030.236	3.413.367.092
Industri	1.769.186.924	2.274.443.292
Perikanan	947.865.230	998.843.804
Industri Kreatif	95.368.257	108.079.227
Perkebunan	309.949.822	81.129.136
Usaha Lainnya	1.100.158.953	1.100.158.952
Jumlah Piutang Pinjaman	49.322.111.098	55.604.840.887
Dikurangi penyisihan penurunan nilai piutang pinjaman	(36.893.857.090)	(33.795.371.727)
Neto	12.428.254.008	21.809.469.160

6. PIUTANG JASA ADMINISTRASI PINJAMAN

a. Rincian Piutang Jasa Administrasi Pinjaman Berdasarkan Wilayah

Rincian piutang jasa administrasi pinjaman berdasarkan wilayah adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Wilayah 1 ^{*)}	12.784.120	15.104.604
Wilayah 2 ^{**)}	32.614.344	18.816.734
Wilayah 3 ^{***)}	33.567.271	19.264.295
Wilayah 4 ^{****)}	14.559.363	13.733.699
Wilayah 5 ^{*****)}	16.579.631	9.022.797
Wilayah 6 ^{*****)}	13.275.522	9.634.169
Jumlah	123.380.251	85.576.298

^{*)} Wilayah 1 terdiri dari kantor cabang pada wilayah Jawa Barat

^{**)} Wilayah 2 terdiri dari kantor cabang pada wilayah DKI Jakarta dan Banten

^{***)} Wilayah 3 terdiri dari kantor cabang pada wilayah Jawa Timur, Bali, NTB dan NTT

^{****)} Wilayah 4 terdiri dari kantor cabang pada wilayah Sumatera

^{*****)} Wilayah 5 terdiri dari kantor cabang pada wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua

^{*****)} Wilayah 6 terdiri dari kantor cabang pada wilayah D.I Yogyakarta dan Jawa Tengah

b. Rincian Piutang Jasa Administrasi Pinjaman Berdasarkan Kualitas Pinjaman

Rincian piutang jasa administrasi pinjaman berdasarkan kualitas pinjaman adalah sebagai berikut:

Kualitas Pinjaman	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Lancar	6.585.657	48.600.124
Kurang lancar	116.794.594	36.976.174
Jumlah	123.380.251	85.576.298

Manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan penurunan nilai piutang tidak diperlukan karena seluruh piutang akan dapat ditagih.

PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah)

7. ASET NETO

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Aset Neto Tidak Terikat		
Saldo awal	33.627.517.696	33.849.453.767
Kenaikan (Penurunan) aset neto tidak terikat	(2.105.323.457)	(221.936.071)
Saldo akhir	31.522.194.239	33.627.517.696

8. PENDAPATAN JASA ADMINISTRASI PINJAMAN

Rincian pendapatan jasa administrasi pinjaman berdasarkan wilayah pada tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	Tahun yang berakhir pada tanggal	
	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Wilayah 1 ^{*)}	129.628.607	162.395.039
Wilayah 2 ^{**)}	253.432.577	249.366.893
Wilayah 3 ^{***)}	251.529.759	226.571.716
Wilayah 4 ^{****)}	113.756.591	118.823.060
Wilayah 5 ^{*****)}	171.184.235	166.812.920
Wilayah 6 ^{*****)}	146.324.130	164.675.422
Jumlah	1.065.855.899	1.088.645.050

- *) Wilayah 1 terdiri dari kantor cabang pada wilayah Jawa Barat
 **) Wilayah 2 terdiri dari kantor cabang pada wilayah DKI Jakarta dan Banten
 ***) Wilayah 3 terdiri dari kantor cabang pada wilayah Jawa timur, Bali, NTB dan NTT
 ****) Wilayah 4 terdiri dari kantor cabang pada wilayah Sumatera
 *****) Wilayah 5 terdiri dari kantor cabang pada wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua
 *****) Wilayah 6 terdiri dari kantor cabang pada wilayah D.I Yogyakarta dan Jawa Tengah

9. PENDAPATAN LAIN-LAIN

Pendapatan lain-lain merupakan pendapatan yang berasal dari sumber di luar kegiatan utama Program Pendanaan UMK dan tidak bersifat rutin yakni berupa denda keterlambatan pembayaran angsuran oleh debitur. Pendapatan lain-lain pada tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp2.744.099 dan Rp1.932.666.

10. PERJANJIAN SIGNIFIKAN

Pada tanggal 13 Oktober 2023, PUMK BTN mengadakan perjanjian kerja sama pengelolaan dana penyaluran dana PUMK dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (Bank BRI). Dalam kerja sama ini Bank BRI bertindak untuk PUMK BTN dalam penyaluran ke PUMK dan mengelola atas dana yang disalurkan tersebut. Dalam perjanjian tersebut diatur tentang kewajiban Bank BRI dalam melaporkan seluruh aktivitas terkait dengan penyaluran dana PUMK yang dananya diperoleh dari PUMK BTN.

Kerja sama di atas sebagai bagian dari pemenuhan atas ketentuan yang mengacu kepada PER BUMN yang berlaku.

Untuk kerja sama di atas, dana awal yang telah diberikan kepada Bank BRI sebesar Rp8.000.000.000. Sampai dengan 31 Desember 2023 dana yang dikerjasamakan dengan Bank BRI telah tersalur sejumlah Rp786.000.000. Belum ada yang dilaporkan Bank BRI terkait dengan dana di atas karena telah disepakati aktivitas penyaluran dana baru akan dilakukan pada tahun 2024.

Dana yang telah dialihkan pengelolaannya sebesar Rp8.000.000.000 di atas, dibukukan oleh PUMK BTN pada akun Piutang kepada BUMN Pembina lain/Lembaga penyalur.

PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam Rupiah)

11. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

a. Jenis hubungan dan unsur transaksi dengan pihak berelasi

<u>Pihak berelasi</u>	<u>Jenis hubungan</u>	<u>Unsur transaksi pihak berelasi</u>
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	BUMN Pembina	Penempatan dana
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Pengendalian melalui Pemerintah Pusat Republik Indonesia	Piutang kepada BUMN Pembina lain/Lembaga penyalur

	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
Aset		
Kas di bank	10.970.559.980	11.732.472.238
Piutang lain-lain	8.000.000.000	-
Jumlah	18.970.559.980	11.732.472.238
Persentase jumlah aset di pihak berelasi terhadap jumlah aset	60,18%	34,89%

12. PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan ini diselesaikan dan disetujui untuk diterbitkan oleh pengelola pada tanggal 12 Februari 2024.

LAPORAN TINGKAT KESEHATAN

Peringkat (*rating*) yang disampaikan dalam rangka penilaian tingkat kesehatan adalah pemeringkatan yang dilakukan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) yang ditandatangani pada tanggal 13 Februari 2024 dengan hasil sebagai berikut:

- a. Peringkat Berdiri Sendiri (*Stand Alone Rating*): AA-
- b. Peringkat Akhir (*Final Rating*): AAA

Dengan demikian, Tingkat Kesehatan untuk PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk pada Tahun Buku 2023 adalah Sangat Sehat (AAA) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.

Adapun hasil lengkap pemeringkatan adalah sebagaimana terlampir.

 **PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK**
DIREKSI

NIXON L.P. NAPITUPULU
Direktur Utama

No.RTG-029/PEF-DIR/II/2024

Jakarta, 13 Februari 2024

Perihal: Penyampaian informasi Peringkat Berdiri Sendiri (*Standalone Rating*) dan Peringkat Final PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Dengan hormat,

Merujuk pada surat PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk nomor 01/S/ERMD/IRMD/I/2024 tertanggal Januari 2024 kepada PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) perihal Surat Permohonan Hasil Pemeringkatan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Berdasarkan Laporan Keuangan Tahun Buku 2023, maka bersama surat ini kami sampaikan Peringkat Berdiri Sendiri (*Standalone Rating*) dan Peringkat Akhir (*Final Rating*) sebagai berikut:

Hasil Pemeringkatan	Definisi
idAA⁻(sa)	Obligor dengan peringkat idAA memiliki sedikit perbedaan dengan peringkat tertinggi yang diberikan, dan memiliki kemampuan yang sangat kuat untuk memenuhi komitmen keuangan jangka panjangnya dibandingkan terhadap obligor Indonesia lainnya. Tanda kurang (-) menunjukkan bahwa peringkat yang diberikan relatif lemah dan di bawah rata-rata kategori yang bersangkutan. Tanda (sa) menunjukkan bahwa peringkat adalah peringkat berdiri sendiri (<i>standalone rating</i>).
idAAA	Obligor berperingkat idAAA merupakan peringkat tertinggi yang diberikan oleh PEFINDO. Kemampuan obligor untuk memenuhi komitmen keuangan jangka panjangnya, relatif terhadap obligor Indonesia lainnya, adalah superior.

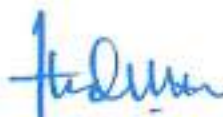
Informasi peringkat yang kami sampaikan di atas adalah untuk kepentingan internal perusahaan dalam rangka pemenuhan Peraturan Menteri (Permen) BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 khususnya terkait Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN, dan tidak untuk digunakan ataupun diberikan kepada pihak lain yang tidak berkaitan dengan kebutuhan tersebut.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irmawati
Direktur Utama



Hendro Utomo
Direktur



PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Menara Bank BTN

Jl. Gajah Mada No. 1 Jakarta 10130

Tel. : 62-21 6336789, 6332666

Fax. : 62-21 6346704

E-mail : csd@btn.co.id

Contact Center : 1500 286

Laporan Tahunan **2023**

KARENA HIDUP GAK CUMA TENTANG HARI INI

